



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2010
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL
TAHUN 2010 - 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dipandang perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 - 2014;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL TAHUN 2010 - 2014.

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini, yang dimaksud dengan:

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 - 2014, yang selanjutnya disebut RPJM Nasional, adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2014.
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kementerian/Lembaga Tahun 2010 - 2014, yang selanjutnya disebut Rencana Strategis Kementerian/Lembaga, adalah dokumen perencanaan Kementerian/Lembaga untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2014.

3. Rencana ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disebut RPJM Daerah, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun sesuai periode masing-masing pemerintah daerah.
4. Menteri adalah Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Pasal 2

- (1) RPJM Nasional merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Presiden hasil Pemilihan Umum tahun 2009.
- (2) RPJM Nasional memuat strategi pembangunan nasional, kebijakan umum, program Kementerian/Lembaga dan lintas Kementerian/Lembaga, kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
- (3) RPJM Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai:
 - a. pedoman bagi Kementerian/Lembaga dalam menyusun Rencana Strategis Kementerian/Lembaga;
 - b. bahan penyusunan dan perbaikan RPJM Daerah dengan memperhatikan tugas pemerintah daerah dalam mencapai sasaran Nasional yang termuat dalam RPJM Nasional;
 - c. pedoman ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- c. pedoman Pemerintah dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah.

Pasal 3

Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah melaksanakan program dalam RPJM Nasional yang dituangkan dalam Rencana Strategis Kementerian/Lembaga dan RPJM Daerah.

Pasal 4

Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dapat melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Menteri dalam menyusun Rencana Strategis Kementerian/Lembaga dan RPJM Daerah.

Pasal 5

Menteri melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan RPJM Nasional yang dituangkan ke dalam Rencana Strategis Kementerian/Lembaga dan RPJM Daerah.

Pasal 6

RPJM Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), tercantum dalam Lampiran Peraturan Presiden ini dan merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 7 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Pasal 7

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Januari 2010

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya

Deputi Sekretaris Kabinet
Bidang Hukum,



Indri Santoso



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2010
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH NASIONAL
(RPJMN)
TAHUN 2010--2014**

**BUKU I
PRIORITAS NASIONAL**

**Diperbanyak Oleh:
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS)
2010**



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

DAFTAR ISI BUKU I RPJMN TAHUN 2010-2014

DAFTAR ISI	i
BAB I PENDAHULUAN	I-1
BAB II KONDISI UMUM	I-3
2.1 Latar Belakang	I-3
2.2 Pencapaian Pembangunan Nasional 2004-2009	I-4
2.3 Tantangan Pembangunan Nasional	I-18
BAB III ARAHAN RPJPN 2005-2025	I-22
3.1 Visi dan Misi RPJPN 2005-2025	I-22
3.2 Arah Pembangunan Jangka Menengah ke-2 (2010-2014)	I-25
BAB IV KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL 2010-2014	I-28
4.1 Strategi dan Kebijakan Pembangunan Nasional	I-28
4.1.1 Visi Indonesia	I-28
4.1.2 Misi Pembangunan	I-37
4.1.3 Agenda Pembangunan	I-33
4.1.4 Sasaran Pembangunan	I-43
4.2 Arah Kebijakan Umum Pembangunan Nasional	I-49
4.2.1 Arah Kebijakan Umum	I-49
4.2.2 Prioritas Nasional	I-50
4.3 Arah Kebijakan Bidang-Bidang Pembangunan	I-61
4.4 Arah dan Kebijakan Pembangunan Kewilayahan	I-62
4.4.1 Pengembangan Wilayah Pulau-Pulau Besar	I-64
4.4.2 Strategi Pengembangan Wilayah Laut	I-71
4.4.3 Pengembangan Kawasan	I-75
BAB V KERANGKA EKONOMI MAKRO 2010-2014	I-77
5.1 Keadaan Ekonomi 2009	I-77
5.2 Prospek Ekonomi 2010-2014	I-80
5.2.1 Peningkatan Kesejahteraan Rakyat melalui Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan	I-80
5.2.2 Stabilitas Ekonomi yang Kokoh	I-82
5.2.3 Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berkeadilan	I-84

5.2.4 Kebutuhan Investasi dan Kebijakan Pendanaan Pembangunan Nasional serta Pemanfaatannya	I-87
5.2.5 Pendanaan Melalui Transfer ke Daerah	I-93
BAB VI PENUTUP	I-100
LAMPIRAN	I-101
Matriks Penjabaran Prioritas Nasional	I-101



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Sasaran Utama Pembangunan Nasional RPJMN 2010-2014	I-46
Tabel 2 Perkiraan Pertumbuhan Ekonomi 2010-2014 (Dalam Persen)	I-81
Tabel 3 Kerangka Ekonomi Makro 2010-2014	I-92

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Keterkaitan Buku I, Buku II, dan Buku III	I-2
Gambar 2 Capaian Indeks Persepsi Korupsi Indonesia	I-7
Gambar 3 Grafik Perbandingan Perkara Masuk dengan Sisa Perkara	I-8
Gambar 4 Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi dan PDB Per Kapita	I-10
Gambar 5 Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin dan Tingkat Kemiskinan.	I-12
Gambar 6 Jumlah Angkatan Kerja, Bekerja, dan Pengangguran Terbuka	I-13
Gambar 7 Perkembangan Produksi Pangan	I-15
Gambar 8 Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka PartisipasiKasar (APK)	I-16
Gambar 9 Status Kesehatan dan Gizi Masyarakat.....	I-17
Gambar 10 Pentahapan Pembangunan Dalam RPJPN 2005-2025	I-25



BAB I

PENDAHULUAN

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 merupakan tahap kedua dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 yang ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007. RPJMN 2010-2014 ini selanjutnya menjadi pedoman bagi kementerian/lembaga dalam menyusun Rencana Strategis kementerian/lembaga (Renstra-KL) dan menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam menyusun/menyesuaikan rencana pembangunan daerahnya masing-masing dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan nasional. Untuk pelaksanaan lebih lanjut, RPJMN akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang akan menjadi pedoman bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN).

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengungkap hal sebagai berikut.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) merupakan **penjabaran dari Visi, Misi, dan Program Presiden** yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), yang memuat strategi pembangunan nasional, kebijakan umum, program kementerian/lembaga dan lintas kementerian/lembaga, kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Agar dapat memenuhi amanat ini, RPJMN 2010-2014 disusun dalam tiga buku yang merupakan satu kesatuan yang utuh dengan masing-masing memuat hal-hal sebagai berikut:

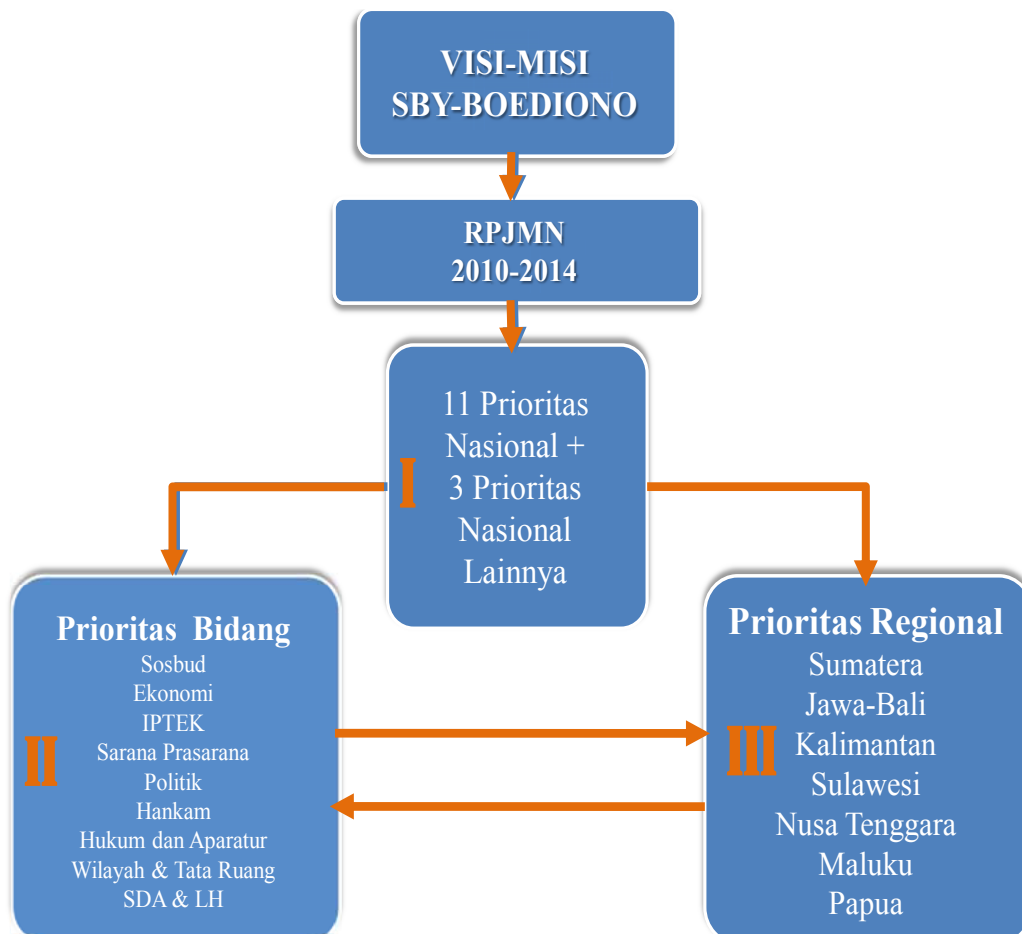
Buku I memuat strategi, kebijakan umum, dan kerangka ekonomi makro yang merupakan penjabaran dari Visi, Misi, dan Program Aksi serta sebelas prioritas pembangunan nasional dari Presiden-Wakil Presiden, Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono dengan visi: **“TERWUJUDNYA INDONESIA YANG SEJAHTERA, DEMOKRATIS, DAN BERKEADILAN.”**

Buku II memuat rencana pembangunan yang mencakup bidang-bidang kehidupan masyarakat sebagaimana yang tertuang dalam RPJPN 2005—2025 dengan tema: **“MEMPERKUAT SINERGI ANTARPIDANG PEMBANGUNAN”** dalam rangka mewujudkan visi pembangunan nasional yang tercantum dalam Buku I.

Buku III memuat rencana pembangunan kewilayahan yang disusun dengan tema: **“MEMPERKUAT SINERGI ANTARA PUSAT DAN DAERAH DAN ANTARDAERAH”** dalam rangka mewujudkan visi pembangunan nasional yang tercantum dalam Buku I.

Dengan demikian, RPJMN 2010-2014 adalah pedoman bagi Pemerintah Pusat/Daerah, masyarakat, dan dunia usaha dalam melaksanakan pembangunan dalam rangka mencapai tujuan bernegara yang tercantum dalam Pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

GAMBAR 1
KETERKAITAN BUKU I, BUKU II, DAN BUKU III





BAB II

KONDISI UMUM

2.1 Latar Belakang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 merupakan penjabaran dari Visi, Misi, dan Program Presiden yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025. Dalam Visi, Misi dan Programnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Boediono, dengan tegas menyatakan keinginan dan keyakinannya untuk mewujudkan bangsa Indonesia yang lebih maju dan sejahtera, lebih mandiri, lebih aman dan damai, serta lebih demokratis dan adil.

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar. Bangsa yang tengah mengukir sejarah baru untuk terus berkembang dan maju. Menjadi bangsa yang besar dan maju adalah cita-cita bangsa Indonesia bersama. Cita-cita untuk menjadikan negeri dan bangsa yang sejahtera, mandiri, demokratis, dan adil. Cita-cita yang luhur dan mulia dari segenap rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke; dari Miangas sampai Pulau Rote. Segenap bangsa Indonesia menginginkan masa depan Indonesia yang lebih baik. Sejarah telah mengajarkan bahwa bangsa Indonesia telah berhasil melewati sejumlah cobaan, tantangan, dan hambatan. Bangsa Indonesia tetap tegak berdiri, melangkah dengan pasti, dan berhasil melewati proses sejarah yang panjang dengan selamat.

Lebih dari satu dasawarsa bangsa Indonesia telah memutuskan untuk menempuh jalur perjalanan baru dalam sejarahnya, jalur demokrasi. Setelah didera oleh krisis multidimensi yang telah mengguncang fondasi bernegara, bangsa Indonesia telah mampu bangkit kembali. Indonesia telah mampu membangun dirinya, bahkan dengan lebih baik lagi, sehingga wibawa dan kehormatannya sebagai sebuah bangsa yang bermartabat, diakui dan dihormati kembali oleh dunia.

Sepuluh tahun yang lalu, ekonomi mengalami guncangan, pertumbuhan mengalami kontraksi di atas 13%, nilai tukar rupiah runtuh, inflasi mencapai 70%, utang pemerintah melambung di atas 100% dari PDB, kemiskinan dan pengangguran melonjak tinggi. Seluruh kegiatan ekonomi praktis merosot dan terhenti. Kerusakan sosial dan konflik berdarah merebak. Tatanan politik berubah secara fundamental dengan pelaksanaan demokrasi, desentralisasi, dan amendemen konstitusi. Tatanan hidup masyarakat berubah secara drastis. Sebagian lembaga publik, menjadi tidak berfungsi. Bangsa Indonesia, mengalami sebuah euforia reformasi dan kebebasan. Proses transisi yang tiba-tiba itu, begitu sulit dikelola karena heterogenitas dan kompleksitas persoalan yang harus kita hadapi.

Dalam lima tahun terakhir, di tengah kondisi negara yang belum sepenuhnya pulih dan tantangan global yang makin sulit, seperti gejolak harga minyak, meroketnya

harga pangan dan terjadinya krisis keuangan global yang menyebabkan resesi ekonomi dunia, Indonesia secara bertahap tetapi pasti, menata dan membangun kembali Indonesia di segala bidang. Perekonomian pulih, mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi yang disertai oleh pemerataan (*growth with equity*) dan bahkan memulihkan lingkungan alam yang rusak. Tatanan sosial yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang luhur dan bermartabat terbangun. Demikian pula, kehidupan politik yang aman, damai, adil, beretika, dan demokratis. Kehidupan budaya dan jati diri bangsa yang kuat dan kreatif semakin dikembangkan. Hukum semakin ditegakkan tanpa pandang bulu. Kondisi yang aman dan damai telah dipulihkan dan dipelihara di daerah-daerah konflik, utamanya di Aceh, Maluku, dan Papua.

Penyelenggaraan pembangunan dalam kurun waktu 2004-2009, telah membuahkan hasil yang menggembirakan, tetapi tetap menyisakan tugas ke depan. Di masa datang, Indonesia memiliki potensi yang besar untuk menjadi negara yang lebih maju lagi, tetapi tantangan dan ujian dari berbagai aspek tidaklah mudah. Penduduk dunia masih akan terus bertambah, alam sudah semakin penuh dan jenuh untuk memenuhi kebutuhan manusia yang terus akan bertambah dan berkembang. Energi, pangan, dan air akan menjadi komoditas yang makin langka dan berharga yang harus terus diamankan, dan dikelola dalam kerangka keharmonisan lingkungan. Kemajuan teknologi dan globalisasi akan memberikan peluang, tetapi juga akan menyajikan tantangan dan persoalan bagi sumber daya manusia Indonesia.

Bangsa Indonesia bertekad teguh, melangkah pasti secara strategis pada periode 2010-2014 untuk bersama-sama mengatasi permasalahan dan tantangan yang dihadapi serta memanfaatkan semua potensi dan peluang yang ada. Semua ini dilakukan bangsa Indonesia untuk mencapai cita-cita luhurnya yaitu (i) terwujudnya peningkatan kesejahteraan rakyat, melalui pembangunan ekonomi yang berlandaskan pada keunggulan daya saing, kekayaan sumber daya alam, sumber daya manusia dan budaya bangsa, yang didukung sepenuhnya oleh kemajuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, (ii) terwujudnya masyarakat, bangsa dan negara yang demokratis, berbudaya, bermartabat dan menjunjung tinggi kebebasan yang bertanggung jawab serta hak asasi manusia, dan (iii) terwujudnya pembangunan yang adil dan merata, yang dilakukan oleh seluruh masyarakat secara aktif, yang hasilnya dapat dinikmati oleh seluruh bangsa Indonesia.

2.2 Pencapaian Pembangunan Nasional 2004-2009

Selama periode 2004-2009, dengan kerja keras semuanya di tengah berbagai tantangan dalam negeri dan internasional yang dihadapi, bangsa Indonesia telah berhasil menciptakan Indonesia yang lebih aman, lebih damai, lebih adil, dan lebih demokratis serta lebih sejahtera. Indonesia tidak hanya sekedar pulih dari krisis, tetapi Indonesia telah mampu membangun ketahanan nasional, prestasi, serta reputasi yang baik di mata dunia.



Keberhasilan pembangunan Indonesia, telah menuai berbagai prestasi dan penghargaan dalam skala global. Kemajuan pembangunan ekonomi dalam lima tahun terakhir, telah makin mengatasi ketertinggalan Indonesia dari negara-negara maju. Negara-negara maju yang tergabung dalam OECD (*Organization of Economic and Cooperation Development*) mengakui dan mengapresiasi kemajuan pembangunan Indonesia. Oleh karena itu, Indonesia bersama Cina, India, Brazil, dan Afrika Selatan diundang untuk masuk dalam kelompok '*enhanced engagement countries*' atau negara yang makin ditingkatkan keterlibatannya dengan negara-negara maju. Indonesia juga tergabung dalam kelompok Group-20 atau G-20, yaitu dua puluh negara yang menguasai 85% Pendapatan Domestik Bruto (PDB) dunia, yang memiliki peranan sangat penting dan menentukan dalam membentuk kebijakan ekonomi global.

Selama lima tahun terakhir telah banyak kemajuan yang telah dicapai di dalam mewujudkan tiga agenda pembangunan RPJMN 2004-2009.

Upaya mewujudkan Indonesia yang aman dan damai, telah membuahkan hasil. Di seluruh Indonesia, tidak ada gangguan keamanan yang berarti. Perdamaian di Nangroe Aceh Darusalam dan di beberapa daerah konflik lainnya seperti Maluku, Sulawesi Tengah, dan Papua telah menunjukkan kondisi keamanan yang semakin kondusif. Peningkatan mobilitas penduduk yang cukup tinggi, merupakan salah satu cermin dari perbaikan keamanan di tanah air. Begitu pula peningkatan investasi, baik investasi yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri, merupakan cerminan dari tercapainya kondisi keamanan yang semakin membaik.

Kemajuan yang berarti juga terlihat dalam upaya mewujudkan Indonesia yang adil dan demokratis. Indonesia berhasil melalui sebuah proses transformasi politik yang telah mengubah tatanan politik negara kita dari negara otoriter menjadi sebuah negara dengan tatanan politik yang relatif demokratis. Lembaga-lembaga penyelenggara negara yang telah ada terlihat bergerak maju secara lebih dinamis dalam melaksanakan peran dan fungsi yang diamanatkan oleh konstitusi. Lembaga-lembaga negara independen yang didirikan pada era reformasi berdasarkan amanat konstitusi UUD 1945 hasil amendemen dan perundang-undangan yang baru telah menunjukkan kinerja yang relatif sangat baik.

Pemilihan umum legislatif telah berjalan secara jujur, adil, aman, dan lancar sebanyak tiga kali setelah reformasi politik digulirkan tahun 1997/1998. Konsolidasi demokrasi mencapai puncak, dengan diberlakukannya pemilihan langsung Presiden dan Wakil Presiden untuk pertama kalinya dalam sejarah Indonesia pada tahun 2004, yang diikuti dengan dimulainya pemilihan langsung kepala daerah pada 2005. Jika pada tahun 2003 seluruh kepala daerah masih dipilih secara tidak langsung oleh DPRD, maka pada tahun 2007 sudah dua pertiganya yang dipilih melalui pemilu langsung. Kini, seluruh kepala daerah di tingkat provinsi dan kabupaten/kota di seluruh tanah air telah dipilih langsung oleh rakyat. Yang juga membanggakan adalah Penyelenggaraan pemilu dan seluruh pemilihan kepala daerah berjalan dengan demokratis, jujur, adil, aman dan

damai.

Akuntabilitas di tingkat pemerintah daerah sudah semakin baik. Para kepala daerah yang mampu menunjukkan kinerja yang prima dalam masa pemerintahannya, pada umumnya terpilih kembali. Beberapa kepala daerah kabupaten/kota dengan kinerja yang optimal, bahkan terpilih menjadi gubernur atau wakil gubernur. Pemerintah juga terus melanjutkan proses pembangunan kelembagaan demokrasi. Mekanisme *checks and balances* telah diperluas ke seluruh lembaga penyelenggara negara di pusat dan daerah. Berbagai institusi independen telah dibentuk untuk memperkuat mekanisme *check and balances*.

Dalam 5 tahun terakhir ini pun, kebebasan sipil menunjukkan kinerja yang positif, yang dapat dilihat dari semakin baiknya jaminan terhadap kebebasan berpendapat, kebebasan dari rasa takut, kebebasan berusaha, dan kebebasan berkumpul dan berserikat.

Dengan berbagai capaian tersebut dapat dikatakan bahwa Indonesia sedang bergerak maju secara lebih mantap dalam proses konsolidasi demokrasi sesuai dengan amanat UUD 1945.

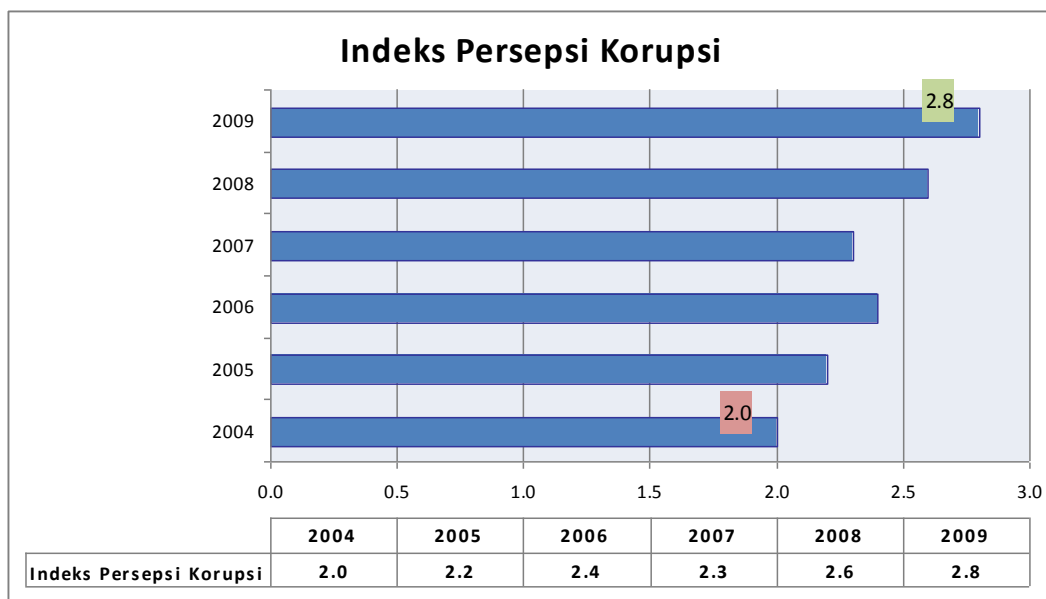
Salah satu bagian penting dalam proses transformasi dalam agenda mewujudkan keadilan adalah terbangunnya tatanan pemerintahan yang makin bersih dan makin berwibawa (*good governance and clean government*). Indonesia berhasil bangkit dari sebuah negara, yang tata kelola pemerintahannya dianggap buruk, karena praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang meluas, menjadi sebuah negara dengan tata kelola pemerintahan yang lebih baik, lebih bersih dan lebih berwibawa, dan bebas dari berbagai kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan.

Dalam bidang penegakan hukum termasuk pemberantasan korupsi, penindakan terhadap pelaku tindak pidana korupsi telah dilakukan tanpa pandang bulu. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada yang kebal hukum. Termasuk juga aparat penegak hukum. Sikap tegas kejaksaan, kepolisian dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah berhasil mengungkap dan mengusut kasus-kasus tindak pidana, yang merugikan keuangan negara. Perwujudan Indonesia yang bersih dari korupsi didukung oleh penyusunan perundangan-undangan yang baik dan kuat, serta pelaksanaan peraturan perundang-undangan secara konsisten dan tanpa kompromi. Dengan langkah ini, Indonesia dapat meningkatkan martabatnya di mata dunia.

Laporan UNDP bertajuk *Tackling Corruption, Transforming Lives*, 2008, menyatakan bahwa indeks persepsi korupsi, *Corruption Perception Index* (CPI) Indonesia telah menunjukkan banyak perbaikan. Dalam skala 1 sampai dengan 10, dengan keterangan bahwa skala 1 menunjukkan persepsi terhadap suatu negara sebagai yang paling korup, dan 10 menunjukkan persepsi terhadap negara sebagai yang paling bersih, indeks persepsi korupsi Indonesia telah mengalami perbaikan dari 2,0 pada tahun 2004, menjadi 2,6 pada tahun 2008 dan 2,8 pada tahun 2009.

Di sisi lain, upaya untuk melakukan reformasi birokrasi secara terencana, komprehensif, dan bertahap terus dimantapkan pelaksanaannya. Reformasi birokrasi, bertujuan untuk memperbaiki pelayanan publik karena jajaran birokrasi adalah pelayan dan pelindung kepentingan masyarakat. Langkah yang telah dan terus dilakukan mencakupi perbaikan sistem dan budaya kerja, pengukuran kinerja, penerapan disiplin, penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan, serta perbaikan sistem remunerasi yang memadai. Termasuk di dalamnya transparansi dan akuntabilitas dalam proses pemerintahan. Semua ini merupakan esensi dari penerapan tata pemerintahan yang baik (*good governance*).

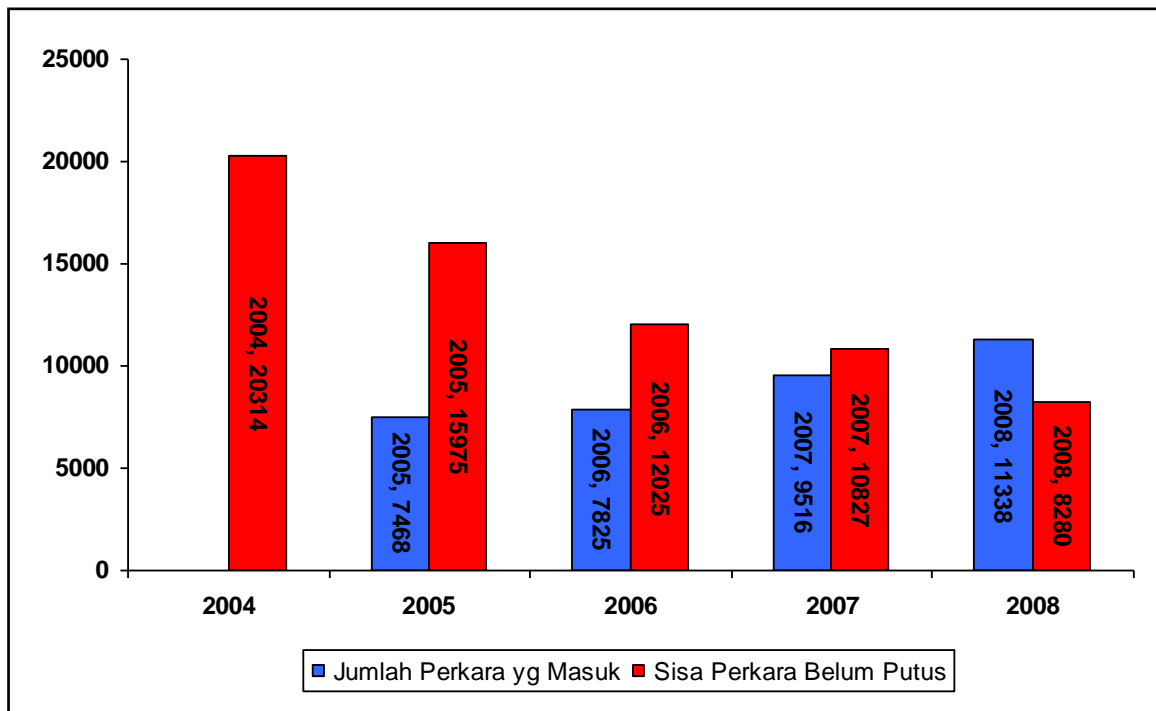
GAMBAR 2
CAPAIAN INDEKS PERSEPSI KORUPSI INDONESIA



Sumber: UNDP

Selanjutnya, keberhasilan pembangunan hukum tidak terlepas dari peran lembaga peradilan. Penanganan perkara di 4 lingkungan peradilan, yaitu lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara, menunjukkan kinerja yang meningkat dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir. Jika dibandingkan antara tahun 2005 dengan tahun 2008, perkara yang masuk ke Mahkamah Agung meningkat sebesar 51% (lihat Gambar 3). Dari sisi perkara yang belum diputus, efektivitas kinerja MA juga menunjukkan peningkatan dengan menurunnya jumlah sisa perkara (*backlog cases*), dimana kondisi sisa perkara pada tahun 2004 sebanyak 20.314 perkara, menurun menjadi 8.280 perkara di tahun 2008.

GAMBAR 3
GRAFIK PERBANDINGAN
PERKARA MASUK DENGAN SISA PERKARA



Dalam upaya peningkatan kesejahteraan, tantangan yang dihadapi oleh pemerintah pada periode 2004--2009 sangat besar. Pada bulan Desember 2004, bencana alam tsunami melanda Aceh, yang diikuti dengan bencana yang terjadi di kepulauan Nias. Di samping itu, guncangan ekonomi global yang berlanjut dengan krisis energi dan pangan pada akhir tahun 2006-2007, telah memberikan tekanan yang kuat terhadap perekonomian Indonesia. Tekanan ini berlanjut dengan terjadinya krisis finansial di Amerika Serikat sejak tahun 2008 yang telah memicu terjadinya krisis ekonomi global yang dicerminkan dengan perlambatan pertumbuhan ekonomi di berbagai negara.

Dalam memasuki tahun 2009, tekanan tersebut terus diwaspadai karena situasi perekonomian dunia tetap mengandung ketidakpastian yang tinggi. Saat itu, prediksi banyak pihak menyatakan bahwa dampak krisis ekonomi global akan terus berlangsung hingga tahun-tahun mendatang ke seluruh dunia. Indonesia tergolong sebagai sedikit negara di dunia yang diyakini oleh beberapa lembaga internasional akan mampu mengarungi krisis global ini dengan relatif baik. Hal ini terbukti dari perekonomian Indonesia yang masih meningkat secara positif, baik dari ketika dimulainya krisis pada tahun 2008 maupun selama tahun 2009.

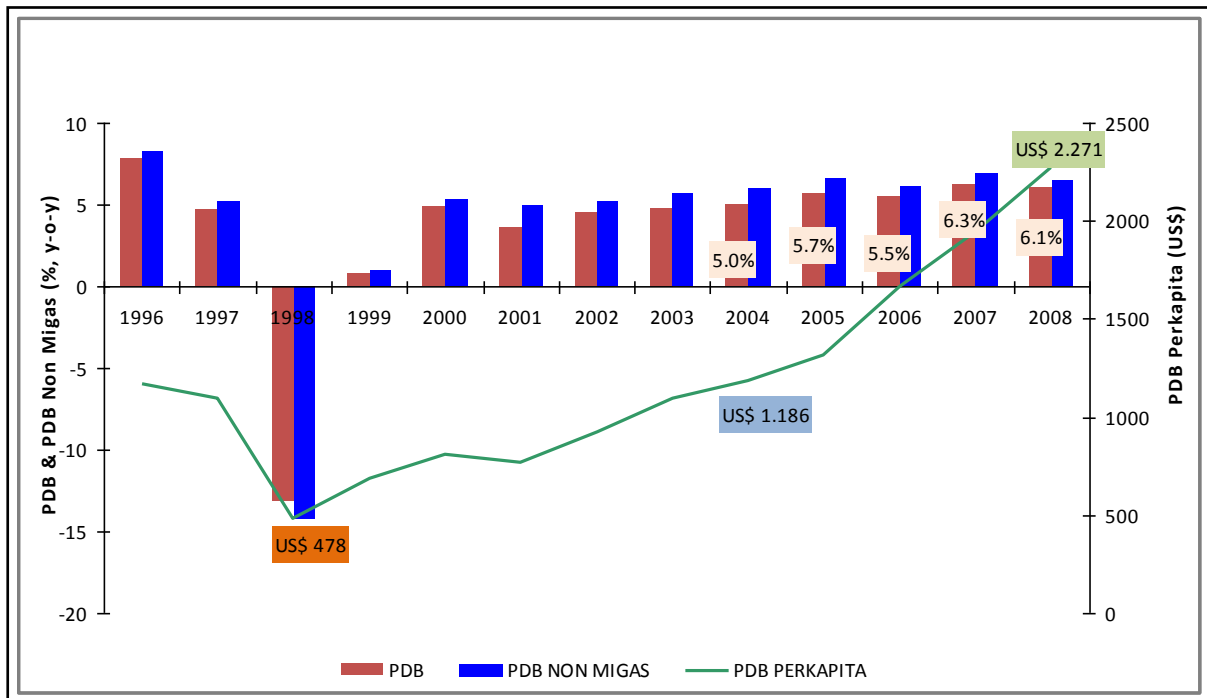
Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2004-2009, telah



ditetapkan tiga strategi pembangunan ekonomi, yaitu *pro growth*, *pro jobs* dan *pro poor*. Melalui strategi *pro growth*, terjadi percepatan laju pertumbuhan ekonomi yang disertai dengan perbaikan distribusi pendapatan (*growth with equity*). Percepatan laju pertumbuhan ini ditandai dengan makin banyaknya kesempatan kerja tercipta sehingga semakin banyak keluarga Indonesia yang dapat dilepaskan dari perangkap kemiskinan, serta memperkuat perekonomian untuk menghadapi berbagai goncangan. Hal ini menunjukkan bahwa strategi *progrowth*, *pro jobs*, dan *pro poor*, telah memberikan arah pembangunan yang benar dan hasil yang diinginkan.

Secara lebih terperinci, dalam agenda *pro growth*, terjadi percepatan laju pertumbuhan ekonomi. Dalam periode 1997-1999, krisis ekonomi telah menyebabkan volume perekonomian menyusut rata-rata minus 2,9 persen per tahun. Sementara itu, dalam periode 2000-2004, pada masa pemulihan ekonomi, perekonomian kembali tumbuh positif, yaitu 4,5 persen. Sementara itu, dalam periode 2005-2008, perekonomian tumbuh rata-rata 6 persen. Bahkan, jika sektor migas dikeluarkan laju pertumbuhan sektor nonmigas sudah mendekati 7 persen per tahun yaitu 6,6 persen (2005-2008) jika dibandingkan dengan 5,4 persen dalam periode 2000-2004. Pada tahun 2009, sampai dengan triwulan III pertumbuhan ekonomi mencapai rata-rata sekitar 4,2 persen sehingga secara keseluruhan tahun 2009 pertumbuhan ekonomi diperkirakan mencapai 4,3 persen. Perkembangan pertumbuhan ekonomi Indonesia masih dikategorikan sebagai negara yang memiliki kinerja perekonomian yang baik mengingat banyaknya Negara yang pertumbuhan ekonominya negatif.

GAMBAR 4
PERKEMBANGAN PERTUMBUHAN EKONOMI DAN PDB PERKAPITA



Percepatan pertumbuhan ekonomi ini tercermin pula dalam peningkatan pendapatan per kapita masyarakat Indonesia. Pendapatan per kapita masyarakat Indonesia telah mencapai USD 2.271 pada akhir 2008, naik hampir dua kali lipat jika dibandingkan dengan pendapatan per kapita tahun 2004, yaitu sebesar USD 1.186. Dengan kenaikan ini, Indonesia telah masuk ke dalam kelompok negara berpendapatan menengah bawah (*lower middle income countries*)

Percepatan pertumbuhan ekonomi tersebut telah menurunkan tingkat kemiskinan. Tingkat kemiskinan berdasarkan garis kemiskinan, telah menurun menjadi 14,1 persen (atau 32,5 juta orang) pada Maret 2009, jika dibandingkan dengan 16,7 persen (36,1 juta orang) pada tahun 2004. Keberhasilan penanggulangan kemiskinan selain merupakan hasil dari tercapainya laju pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi juga didukung oleh berbagai program intervensi yang merupakan bagian dari pemenuhan hak dasar rakyat, yang terus dilakukan untuk memberikan akses yang lebih luas kepada kelompok masyarakat yang berpenghasilan rendah agar dapat menikmati lajunya percepatan pertumbuhan ekonomi. Langkah ini ditempuh dengan antara lain dengan cara-cara sebagai berikut:

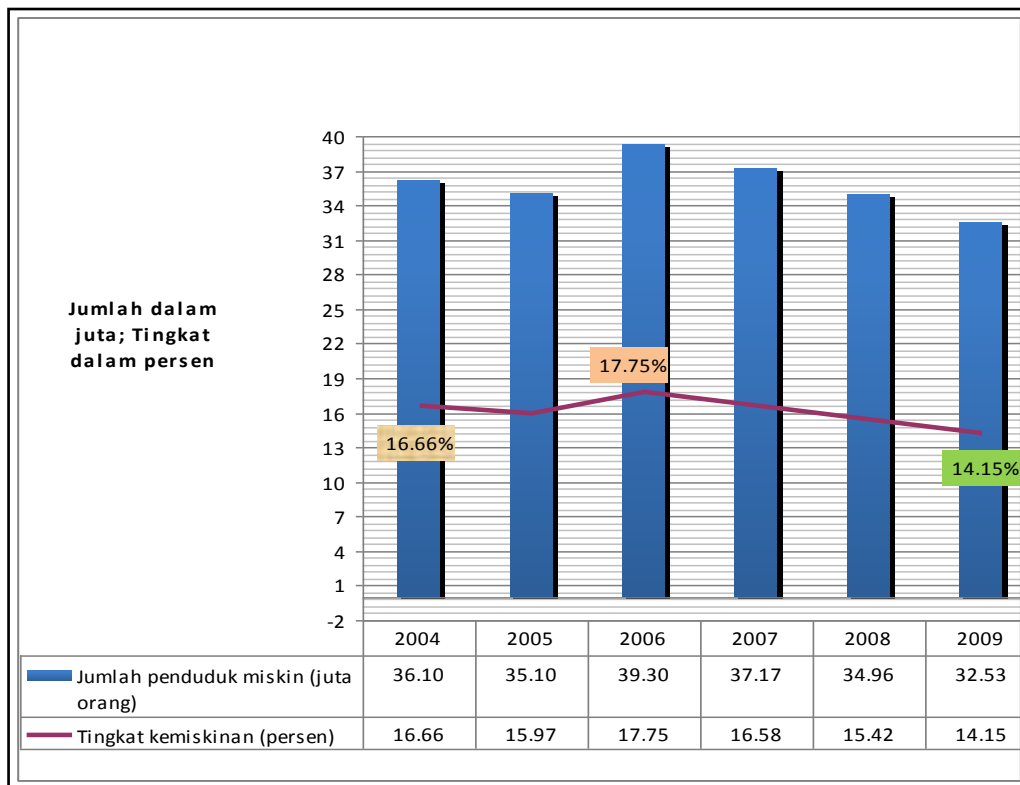
Pertama adalah melalui subsidi (seperti subsidi pangan, pupuk, benih, dan kredit program) serta dalam bentuk bantuan sosial (Bansos), seperti Program Jaminan



Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Bantuan Operasi Sekolah (BOS), dan Program Keluarga Harapan (PKH). Program ini dilaksanakan untuk membantu pemenuhan kebutuhan dasar yang tidak atau belum mampu dipenuhi oleh kemampuan sendiri. Di samping itu, telah dialokasikan juga anggaran berupa Bantuan Langsung Masyarakat sebagai bagian Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri, dan dana penjaminan kredit/pembiayaan bagi usaha mikro, kecil, menengah (UMKM) dan koperasi melalui Program Kredit Usaha Rakyat (KUR).

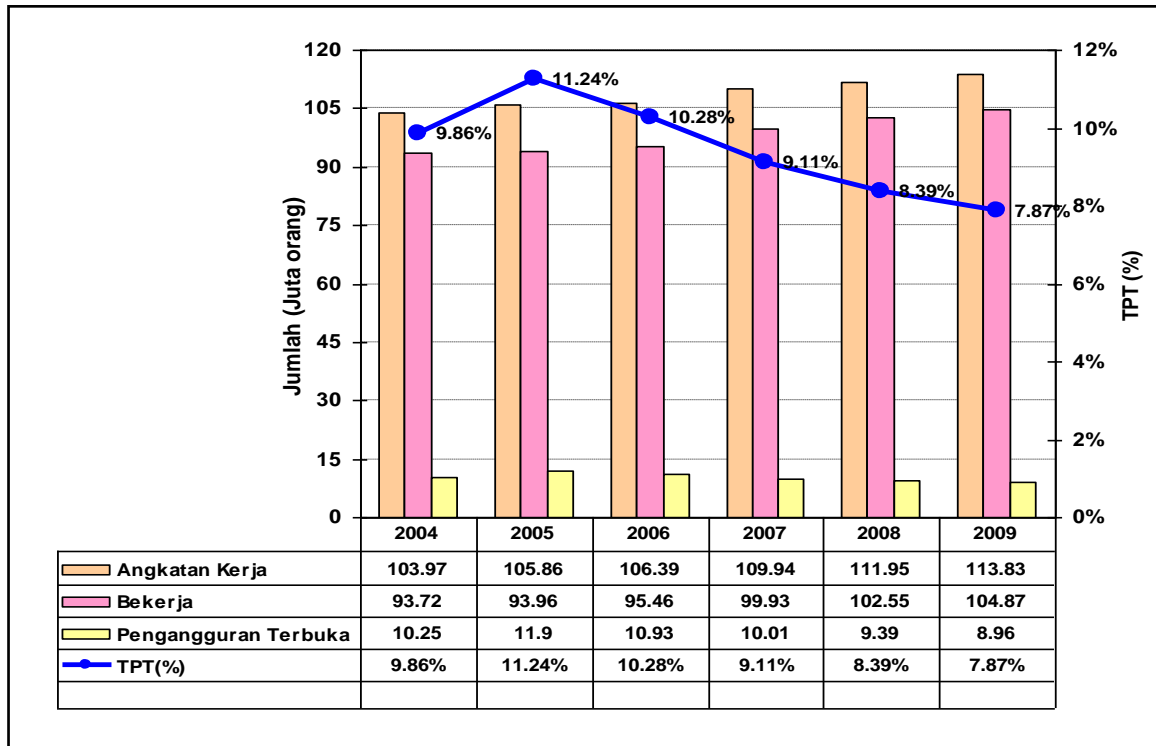
Kedua adalah mempermudah dan memperluas kesempatan usaha dengan menghilangkan berbagai pungutan yang muncul di berbagai daerah akibat eforia reformasi dan desentralisasi yang telah banyak membebani usaha mikro, kecil dan menengah. Berbagai upaya telah ditempuh untuk memperbaiki iklim berusaha ini. Salah satunya adalah dengan melakukan amendemen UU Pajak dan Retribusi Daerah untuk mendisiplinkan pemerintah daerah dalam menetapkan pungutan baru dengan tidak menghilangkan semangat desentralisasi fiskal. Langkah lainnya, ditempuh dengan menerbitkan Inpres No 6 /2007 dan Inpres 5 /2008 yang memuat program aksi yang kongkrit dalam memperbaiki iklim berusaha bagi UMKM.

GAMBAR 5
PERKEMBANGAN JUMLAH PENDUDUK MISKIN DAN TINGKAT KEMISKINAN



Perubahan yang berarti terlihat sebagai akibat dari strategi *pro jobs*. Pada periode tahun 2001-2004, penambahan angkatan kerja baru sebesar 1,72 juta per tahun, sementara kesempatan kerja yang mampu tercipta hanya 970 ribu per tahun. Pada periode 2005-2009, angkatan kerja bertambah 1,99 juta per tahun sementara kesempatan kerja yang tercipta sebesar 2,73 juta per tahun. Dengan demikian, jumlah penganggur dapat diturunkan dari 10,25 juta tahun 2004 menjadi 8,96 juta tahun 2009, dan tingkat pengangguran terbuka menurun dari 9,86% menjadi 7,87%. Kesempatan kerja tetap tercipta, meskipun terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dimulai sejak akhir tahun 2008, ketika jumlah perusahaan yang mengajukan permohonan PHK cukup banyak bersamaan dengan berakhirnya kontrak produksi khususnya untuk barang tujuan ekspor. Pekerja formal bertambah 3,26 juta dan informal 7,65 juta. Perpindahan 'surplus tenaga kerja' keluar dari lapangan pekerjaan informal ke pekerjaan-pekerjaan formal yang lebih produktif dan memberikan upah yang lebih tinggi merupakan tujuan utama dari siklus pembangunan, pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan.

GAMBAR 6
JUMLAH ANGKATAN KERJA, BEKERJA, DAN PENGANGGURAN TERBUKA



Di bidang sarana dan prasarana, beberapa infrastruktur yang cukup strategis telah berhasil diselesaikan pembangunannya, antara lain penyelesaian pembangunan Bandara Hasanuddin Makassar, pembangunan Jembatan Suramadu dan pengembangan terhadap 11 pelabuhan peti kemas (*full container terminal*) untuk menunjang ekspor-impor, meliputi Pelabuhan Tanjung Priok, Tanjung Perak, Belawan, Tanjung Emas, Panjang, Makasar, Banjarmasin, Pontianak, Bitung, Samarinda, dan Palembang. Di samping itu, telah dibangun 11 buah waduk yang mampu menampung sekitar 79 juta meter kubik untuk memenuhi kebutuhan air irigasi, rumah tangga, industri serta keperluan pembangkit listrik. Program percepatan pembangunan PLTU 10.000 MW, secara signifikan telah meningkatkan rasio elektrifikasi dan rasio desa berlistrik masing-masing sekitar 66,3 persen dan 96,8 persen dengan tingkat *losses* sekitar 11,5 persen. Program tersebut dimaksudkan untuk mengurangi ketergantungan terhadap BBM sekaligus menyehatkan bauran energi di pembangkit tenaga listrik. Sementara itu, pengembangan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi telah mampu meningkatkan pertumbuhan teledensitas *fixed line* (termasuk *fixed wireless access* atau FWA) hampir 140 persen, yaitu dari 4,79 persen menjadi 11,49 persen, pertumbuhan seluler sebesar 340 persen, dan pertumbuhan pengguna internet sebesar 101 persen.

Pemerintah juga mendorong partisipasi swasta, masyarakat, dan pemerintah

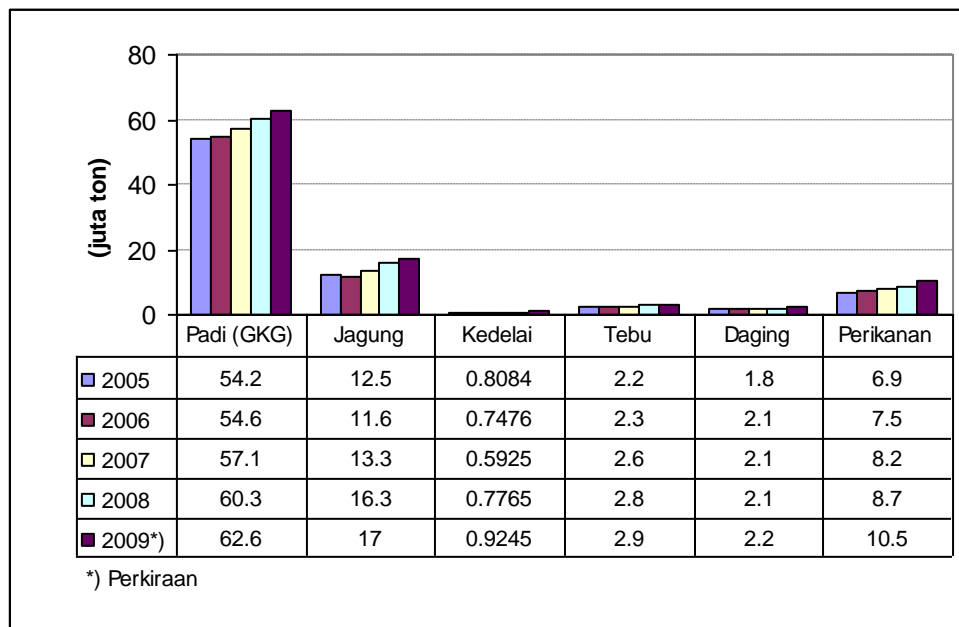
daerah dalam pelayanan dan penyelenggaraan sarana dan prasarana. Skema pembangunan sarana dan prasarana melalui Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS) yang tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) No. 67 Tahun 2005 terus-menerus dilakukan penyempurnaannya. Revisi terhadap Perpres tersebut disertai pula dengan pedoman teknis pelaksanaan KPS untuk tingkat pusat dan daerah. Pemerintah juga telah meluncurkan Paket Kebijakan Ekonomi 2008-2009 dalam Inpres No 5 tahun 2008 tentang Fokus Pembangunan Ekonomi Tahun 2008-2009 sebagai kelanjutan dari berbagai kebijakan sebelumnya. Upaya tersebut dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang menghambat investasi di sektor sarana dan prasarana, termasuk persoalan yang terkait dengan partisipasi sektor swasta. Elemen penting dari paket kebijakan tersebut adalah kerangka kerja bagi KPS, termasuk di dalamnya mekanisme penyiapan proyek, proses tender yang transparan dan akuntabel, alokasi risiko antara investor dan Pemerintah.

Kemajuan yang berarti juga terjadi dalam produksi pangan. Produksi semua komoditas pangan meningkat tajam, khususnya dalam dua tahun terakhir (lihat Gambar 7). Produksi beras tahun 2008 sebesar 59,9 juta ton adalah tertinggi jika dibandingkan dengan jumlah produksi yang bisa dihasilkan selama ini. Peningkatan produksi ini bukan hanya melepaskan bangsa Indonesia dari krisis pangan, tetapi juga meringankan beban bangsa lain dalam mengatasi krisis pasokan beras di pasar global. Indonesia sebelumnya merupakan salah satu importir beras dunia yang cukup besar, akibatnya setiap Indonesia mengimpor beras dalam jumlah besar, harga beras dunia akan meningkat USD 20-50/ton.

Keberhasilan meningkatkan produksi beras sekaligus mengendalikan harganya, telah menjadikan Indonesia mampu mengatasi krisis pangan. Keberhasilan ini diakui dan dihargai oleh bangsa-bangsa lain. Pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Pangan yang diadakan di Roma, bulan Juni 2008, Organisasi Pangan Dunia (FAO) memuji keberhasilan tersebut. FAO bahkan menyatakan bahwa keberhasilan itu layak dijadikan model bagi negara lain dalam mengatasi krisis pangan global. Keberhasilan dalam meningkatkan produksi beras ini harus terus dilanjutkan.

Kecenderungan peningkatan produksi pangan juga terjadi pada komoditas lain seperti gula, kedele dan jagung. Keberhasilan peningkatan pangan melalui peningkatan produksi akan menguntungkan produsen dan konsumen. Produsen akan mengalami peningkatan kesejahteraan, sementara konsumen memperoleh keuntungan dalam bentuk tercapainya stabilitas harga. Karena lebih dari separuh keluarga miskin menggantungkan sumber penghasilannya dari kegiatan pertanian dan pedesaan, manfaat perbaikan produksi di bidang pangan ini akan lebih banyak dinikmati oleh keluarga miskin. Kondisi ini pada gilirannya mempercepat penurunan tingkat kemiskinan di daerah pedesaan seperti yang pernah terjadi pada periode 1970an dan 1980an.

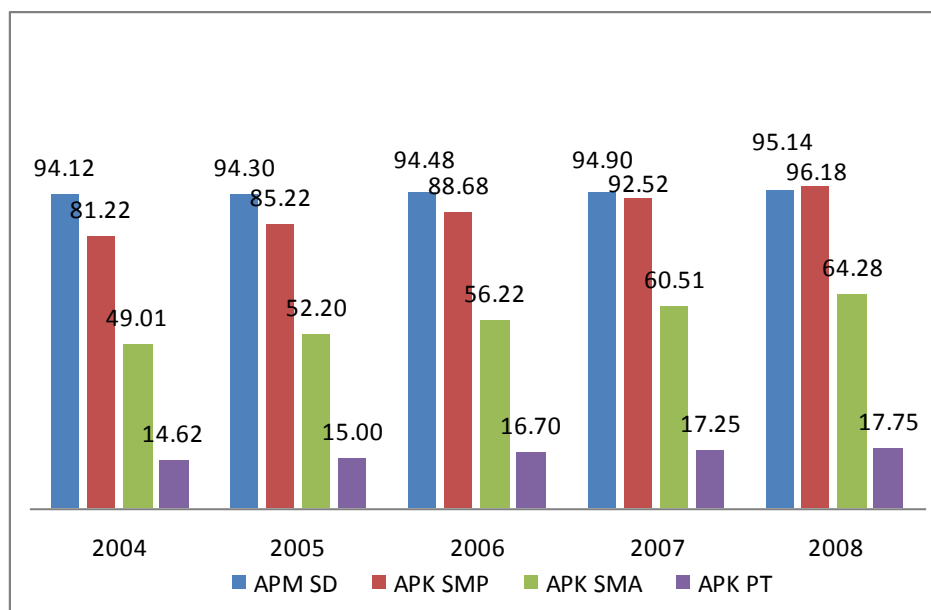
GAMBAR 7
PERKEMBANGAN PRODUKSI PANGAN



Dalam bidang pendidikan, peningkatan anggaran secara dramatis telah dilakukan. Jika pada tahun 2005 anggaran pendidikan hanya Rp 78,5 triliun, maka sesuai dengan amanat konstitusi anggaran pendidikan telah berhasil ditingkatkan dua kali lipat, menjadi Rp 154,2 triliun pada 2008. Pada tahun 2009, amanat konstitusi telah berhasil dipenuhi dengan meningkatkan anggaran pendidikan menjadi Rp 207,4 triliun atau 20 % dari APBN. Peningkatan anggaran pendidikan dapat memperbaiki akses bidang pendidikan dan kualitas pendidikan.

Kemajuan juga terlihat dari peningkatan angka tingkat partisipasi kasar tingkat SMP/MTS/SMPLB/Paket B dan SMA/SMK/MA/SMALB/Paket C yang meningkat dari 85,22 persen dan 52,20 persen (2005) menjadi 99,18 persen dan 64,28 persen (2008). Peningkatan angka tingkat partisipasi kasar ini adalah berkat dari berjalannya Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang dimulai sejak tahun 2005. Program ini memungkinkan biaya sekolah yang harus dibayar oleh keluarga Indonesia secara efektif dapat ditekan hingga tingkat yang minimum dan dengan dukungan dari APBD, makin banyak daerah yang mampu membebaskan biaya pendidikannya. Dari sisi permintaan, pemerintah telah merintis skema insentif baru untuk mendorong keluarga miskin mengirimkan anaknya ke sekolah melalui Program Keluarga Harapan (PKH) dengan memberikan bantuan tunai bersyarat. Kombinasi program BOS yang bersifat universal dari sisi penawaran dan program PKH yang terbatas, diharapkan bukan hanya mampu memutuskan rantai kemiskinan antargenerasi, tetapi juga memperkuat daya saing bangsa dalam persaingan global yang makin ketat.

GAMBAR 8
PERKEMBANGAN ANGKA PARTISIPASI MURNI (APM) DAN
ANGKA PARTISIPASI KASAR (APK)



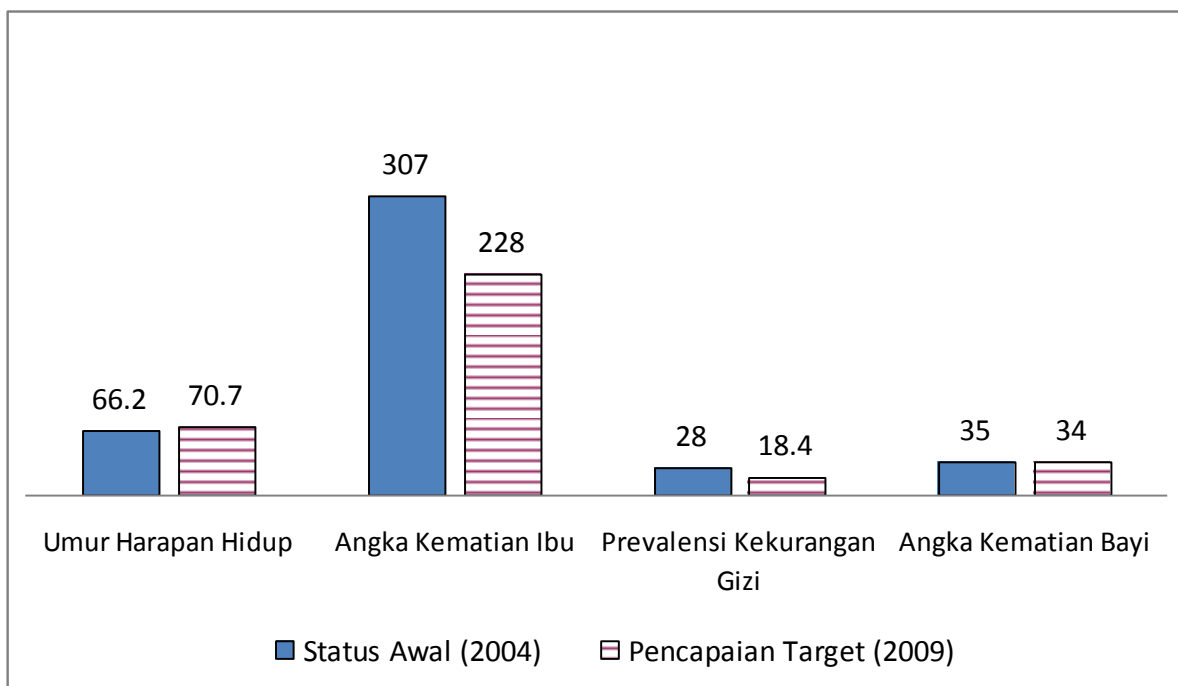
Keberhasilan program pendidikan sangat bergantung pada pasokan dan kualitas guru dan dosen. Ekspansi anggaran bidang pendidikan di samping digunakan untuk membantu pemerintah daerah dalam merehabilitasi gedung sekolah – yang dibangun tahun 1970-an dan 1980-an – serta penambahan ruang kelas dan unit sekolah baru, digunakan pula untuk meningkatkan kesejahteraan guru dan dosen.

Peningkatan kualitas pendidikan dilakukan juga dengan memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengembangkan sekolah dan universitas berkualitas internasional. Dimulai pada tingkat SMA pada sekolah negeri, pemerintah telah secara bertahap meningkatkan kualitasnya menjadi bertaraf internasional dengan melakukan komputerisasi dan meningkatkan penguasaan bahasa asing yang disertai dengan akses internasional.

Selain dalam bidang pendidikan, pelayanan di bidang kesehatan juga terus ditingkatkan. Jika pada tahun 2005 anggaran kesehatan hanya mencapai Rp 7,7 triliun maka pada tahun 2008 anggaran kesehatan menjadi sekitar Rp 17,9 triliun. Sebagian besar tambahan anggaran kesehatan itu digunakan untuk menggulirkan pelayanan kesehatan di Puskesmas dan Posyandu yang dibiayai antara lain melalui Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan bagi Masyarakat kurang mampu (Jamkesmas). Program ini pada tahun 2008 berhasil melayani 76,4 juta jiwa. Untuk lebih meningkatkan keterjangkauan masyarakat terhadap obat, harga obat generik telah diturunkan secara substansial dan terus menerus. Sebagian dari anggaran kesehatan

yang terus meningkat, digunakan untuk merekrut tenaga dokter dan paramedis baru serta membantu pemerintah daerah dalam melakukan rehabilitasi puskesmas dan membangun rumah sakit baru di berbagai daerah. Sebagian dana kesehatan juga telah digunakan untuk program Revitalisasi Keluarga Berencana yang sempat terlantar pada awal reformasi dan desentralisasi. Ekspansi sektor kesehatan sebagian telah memberikan hasil yang nyata, seperti penurunan tingkat prevalensi anak gizi buruk.

GAMBAR 9
STATUS KESEHATAN DAN GIZI MASYARAKAT



Dalam kaitannya dengan upaya menghadapi dan mengatasi krisis ekonomi global, hingga saat ini Indonesia relatif lebih siap jika dibandingkan dengan banyak negara lain. Sektor keuangan jauh lebih sehat jika dibandingkan dengan keadaan sebelum krisis ekonomi 1997/1998. Kredit bermasalah pada akhir September 2009 hanya sebesar 3,8 persen, jauh di bawah 35 persen pada saat menjelang krisis 1997/1998. Fungsi supervisi perbankan dan sektor keuangan berjalan semakin baik. Resiko ekonomi makro juga cenderung menurun, antara lain dapat dilihat dari rasio utang pemerintah termasuk utang luar negeri. Keberhasilan menghadapi krisis ekonomi global ini menyebabkan Indonesia menjadi bangsa yang lebih dihargai. Jika di masa lalu, Indonesia selalu mendapat rekomendasi dalam kebijakan mengatasi krisis, kini beberapa negara di dunia meminta rekomendasi dan belajar dari Indonesia tentang cara mengatasi krisis.

Kemajuan-kemajuan yang dicapai diperoleh melalui kebersamaan dan kerja

keras di antara pemerintah, dunia usaha, dan segenap rakyat Indonesia. Salah satu hasilnya adalah dalam peningkatan pengelolaan dan kesadaran pembayaran pajak. Sumber pendanaan pembangunan Pemerintah kini lebih banyak mengandalkan penerimaan pajak dan pembiayaan dari pasar domestik. Konsolidasi fiskal yang dilakukan di masa lalu telah membuahkan hasil yang memadai, bukan hanya untuk memperkuat fiskal secara berkelanjutan, tetapi juga menciptakan ketersediaan dana pembangunan yang memadai untuk mendorong perekonomian domestik.

Inti dari konsolidasi fiskal terletak pada perbaikan struktur penerimaan negara, peningkatan efektivitas pengeluaran pemerintah baik pusat maupun daerah, serta terkendalinya risiko fiskal terutama menyangkut sisi pembiayaan defisit anggaran. Struktur penerimaan makin sehat dengan meningkatnya peran penerimaan nonmigas, khususnya pajak penghasilan. Jumlah penduduk yang memiliki NPWP telah melebihi 10 juta pada tahun 2008. Peningkatan jumlah wajib pajak di samping meningkatkan penerimaan pajak juga mengurangi risiko dalam penerimaan. Rasio pajak terhadap PDB meningkat dari 12,5 persen pada tahun 2005 menjadi 14,1 persen pada tahun 2008. Peningkatan penerimaan ini merupakan hasil dari reformasi perpajakan secara komprehensif sehingga telah menimbulkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak.

Dari sisi pengeluaran, belanja negara untuk kebutuhan yang penting bagi pembangunan terus meningkat terutama untuk keperluan pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Efektivitas pengeluaran pemerintah makin mendekati tingkat optimal dan makin mengarah pada kegiatan-kegiatan yang penting. Meskipun masih ada pengeluaran yang tidak dapat direalisasikan, namun hal ini sebagian disebabkan oleh efisiensi sebagai hasil sistem pengadaan yang makin baik, antara lain melalui *e-procurement* dapat menghemat pengeluaran hingga 15 persen.

Konsolidasi fiskal telah menghasilkan perbaikan risiko ekonomi makro Indonesia. Rasio utang pemerintah terhadap PDB yang mencapai 56,4 persen pada tahun 2004 secara bertahap menurun menjadi sekitar 30 persen pada tahun 2009. Penurunan rasio ini diikuti pula dengan dengan penurunan jumlah stok utang luar negeri. Pembiayaan defisit anggaran kini lebih mengandalkan pada sumber domestik. Penurunan rasio utang ini, juga lebih baik dibandingkan dengan kecenderungan penurunan rasio utang di negara Asia lainnya. Dengan demikian, proses konsolidasi fiskal ini bisa menjadi motor untuk mempercepat perbaikan peringkat *investment grade* Indonesia dalam 2 tahun mendatang.

2.3 Tantangan Pembangunan Nasional

Dalam kurun waktu lima tahun mendatang (2010-2014), tantangan pembangunan tidaklah semakin ringan. Terdapat beberapa tantangan yang dihadapi untuk mencapai perwujudan masyarakat Indonesia yang sejahtera di tengah persaingan



global yang meningkat.

Pertama, capaian laju pertumbuhan ekonomi sekitar 6% selama periode 2004-2008 belum cukup untuk mewujudkan tujuan masyarakat Indonesia yang sejahtera. Masih banyak masyarakat Indonesia yang tertinggal dan tidak dapat menikmati buah dari pertumbuhan ekonomi jika laju pertumbuhan hanya mencapai 6% per tahun. Teknologi yang makin maju telah mengurangi jumlah tenaga kerja dalam kegiatan produksi. Untuk menciptakan pembangunan yang inklusif, pembangunan memerlukan percepatan pertumbuhan ekonomi menuju di atas 6,5 persen per tahun dalam lima tahun mendatang.

Kedua, percepatan pertumbuhan ekonomi yang diinginkan adalah pertumbuhan ekonomi yang mengikutsertakan sebanyak mungkin penduduk Indonesia (*inclusive growth*). Hal ini untuk mempercepat penurunan jumlah penduduk di bawah garis kemiskinan serta memperkuat kapasitas keluarga Indonesia dalam menghadapi berbagai goncangan. Pengurangan kemiskinan tidak sepenuhnya dapat mengandalkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memerlukan berbagai intervensi yang efektif. Pola pertumbuhan yang inklusif memerlukan intervensi pemerintah yang tepat memihak (afirmatif) kepada kelompok yang terpinggirkan, untuk memastikan semua kelompok masyarakat memiliki kapasitas yang memadai dan akses yang sama terhadap kesempatan ekonomi yang muncul. Mengingat peningkatan kapasitas ini memerlukan waktu, maka program afirmatif perlu dilakukan dengan secara konsisten dan kontinu dengan sasaran yang terarah, jelas, dan tepat-

Ketiga, untuk mengurangi kesenjangan antardaerah, pertumbuhan ekonomi harus tersebar ke seluruh wilayah Indonesia, terutama daerah-daerah yang masih memiliki tingkat kemiskinan yang cukup tinggi. Pertumbuhan di seluruh wilayah perlu memperhatikan keterkaitan terhadap pelaku dan sumber daya lokal sehingga masyarakat lebih banyak berperan di dalamnya dan ikut menikmati hasil pertumbuhan, sekaligus nilai tambah yang dinikmati di daerah-daerah.

Keempat, untuk mengurangi kesenjangan antarpelaku usaha, pertumbuhan ekonomi yang tercipta harus dapat memberikan kesempatan kerja seluas-luasnya dan lebih merata ke sektor-sektor pembangunan, yang banyak menyediakan lapangan kerja. Pertumbuhan ekonomi melalui investasi, diharapkan dapat menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Usaha mikro, kecil, dan menengah, diharapkan juga dapat tumbuh dan berkembang dengan sehat agar dapat meningkatkan produktivitas dan daya saing yang lebih baik. Harapan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dapat dicapai jika para pekerja tersebut dilengkapi dengan keahlian, kompetensi, kemampuan untuk bekerja (*employable*) dan disiapkan untuk menghadapi persaingan global dalam pasar kerja. Pendidikan saja tidak cukup, karena banyak para pekerja masih belum siap untuk memasuki pasar kerja.

Kelima, pertumbuhan ekonomi tidak boleh merusak lingkungan hidup. Kerusakan lingkungan hidup akan menyebabkan pertumbuhan ekonomi tidak

berkelanjutan. Pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam yang tidak tepat akan mengakibatkan sumber daya menyusut lebih cepat dan dengan mudah mengembalikan krisis pangan dan energi seperti yang terjadi tahun 2007-2008 yang lalu. Kerusakan lingkungan hidup mengakibatkan biaya hidup meningkat yang pada gilirannya menurunkan kualitas hidup. Kerusakan lingkungan hidup juga diduga menjadi salah satu penyebab utama munculnya epidemik dan penyakit saluran pernapasan. Dimensi lingkungan hidup pun makin luas berkaitan dengan perubahan iklim yang mempunyai keterkaitan kuat dengan kerusakan lingkungan hidup dan pembangunan yang tidak ramah lingkungan. Ancaman perubahan iklim ini bukan hanya meningkatkan kemungkinan terjadinya goncangan yang tidak terduga seperti bencana alam, tetapi juga dapat mengancam produktivitas dari sumber daya alam. Jika hal ini terjadi, krisis pangan pun dapat kembali terjadi setiap saat.

Keenam, pembangunan infrastruktur makin penting jika dilihat dari berbagai dimensi. Percepatan pertumbuhan ekonomi jelas membutuhkan tambahan kuantitas dan perbaikan kualitas infrastruktur. Revitalisasi pertanian tidak mungkin berhasil tanpa infrastruktur yang memadai, mengingat biaya pemasaran makin dominan dalam struktur biaya akhir suatu komoditas pertanian. Keluarga miskin tidak akan mampu ikut dalam gelombang pertumbuhan ekonomi jika terisolasi akibat ketiadaan infrastruktur. Masalah lingkungan hidup seperti polusi air, udara dan tanah, atau banjir di lingkungan perkotaan memiliki keterkaitan yang kuat dengan ketiadaan infrastruktur yang memadai. Walaupun pengeluaran dalam bidang infrastruktur telah ditingkatkan, kesenjangan infrastruktur masih terasa, baik di tingkat nasional maupun antardaerah. Karena itu, pembangunan infrastruktur dasar harus menjadi prioritas pembangunan.

Ketujuh, sumber pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan harus berasal dari peningkatan produktivitas. Peningkatan produktivitas sangat ditentukan oleh peningkatan kualitas sumber daya manusia, utamanya dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sumber daya manusia, bukan hanya sebagai faktor produksi melainkan ikut berfungsi mengkoordinasi faktor produksi lain dalam kegiatan ekonomi. Karenanya, peningkatan kualitas manusia Indonesia, khususnya dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, menjadi faktor penentu dalam mencapai pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Peningkatan sumber daya manusia di Indonesia dalam lima tahun ke depan harus terfokus pada peningkatan kualitas manusia Indonesia secara keseluruhan dan memperbaiki kesenjangan kualitas manusia, baik dilihat dari status golongan pendapatan, gender maupun antardaerah. Hanya dengan intervensi pemerintah, kesenjangan kualitas sumber daya manusia dapat teratasi.

Kedelapan, keberhasilan proses pembangunan ekonomi tergantung pada kualitas birokrasi. Pada saat ini kualitas birokrasi Indonesia perlu ditingkatkan untuk menghadapi persaingan di era globalisasi. Ekonomi biaya tinggi yang terjadi hingga dewasa ini tidak terlepas dari rendahnya kualitas birokrasi. Oleh karena itu, keberhasilan reformasi birokrasi merupakan kunci utama yang membawa Indonesia



dalam kancah persaingan di pasar global dan meningkatkan daya saing nasional.

Kesembilan, demokrasi telah diputuskan sebagai dasar hidup berbangsa. Dewasa ini pelaksanaan demokrasi telah mengalami kemajuan. Harus diakui, sebagian masih demokrasi prosedural. Masih banyak esensi demokrasi yang substansial yang belum mampu dijalankan sepenuhnya. Oleh karena itu, konsolidasi demokrasi harus terus diperkuat. Selanjutnya, terkait erat dengan demokrasi adalah desentralisasi. Desentralisasi sejak hampir 10 tahun lalu telah berhasil dijalankan. Proses transformasi sistem pemerintahan ini belum berjalan sempurna. Pemantapan proses desentralisasi melalui penguatan sinergi pusat-daerah dan antar daerah merupakan agenda penting dalam rangka memperoleh manfaat yang optimal dari integrasi dengan ekonomi global. Dalam kaitan itu, salah satu langkah strategis yang harus dilakukan adalah peningkatan kapasitas pemerintah daerah.

Kesepuluh, dalam sistem yang demokratis, hukum harus menjadi panglima. Penegakan hukum secara konsisten, termasuk pemberantasan korupsi, dapat memberikan rasa aman, adil, dan kepastian berusaha. Banyak upaya perbaikan sistem hukum yang sudah dibenahi. Namun, saat ini fungsi hukum untuk menuntun perilaku berkehidupan Bangsa Indonesia sehari-hari masih harus banyak diperbaiki.

BAB III

ARAHAN RPJPN 2005-2025

3.1 Visi dan Misi RPJPN 2005-2025

Berdasarkan kondisi bangsa Indonesia saat ini, tantangan yang dihadapi dalam 20 tahunan mendatang dengan memperhitungkan modal dasar yang dimiliki oleh bangsa Indonesia, dan amanat pembangunan yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka **Visi Pembangunan Nasional tahun 2005-2025** adalah:

INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL DAN MAKMUR

Dengan penjelasan sebagai berikut:

Mandiri: Bangsa mandiri adalah bangsa yang mampu mewujudkan kehidupan sejajar dan sederajat dengan bangsa lain yang telah maju dengan mengandalkan pada kemampuan dan kekuatan sendiri.

Maju: Suatu bangsa dikatakan makin maju apabila sumber daya manusianya memiliki kepribadian bangsa, berakhlak mulia, dan berkualitas pendidikan yang tinggi.

Adil: Sedangkan Bangsa adil berarti tidak ada diskriminasi dalam bentuk apapun, baik antarindividu, gender, maupun wilayah.

Makmur: Kemudian Bangsa yang makmur adalah bangsa yang sudah terpenuhi seluruh kebutuhan hidupnya, sehingga dapat memberikan makna dan arti penting bagi bangsa-bangsa lain di dunia.

Delapan Misi Pembangunan Nasional adalah sebagai berikut:

1. **Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila** adalah memperkuat jati diri dan karakter bangsa melalui pendidikan yang bertujuan membentuk manusia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mematuhi aturan hukum, memelihara kerukunan internal dan antarumat beragama, melaksanakan interaksi antarbudaya, mengembangkan modal sosial, menerapkan nilai-nilai luhur budaya bangsa, dan memiliki kebanggaan sebagai bangsa Indonesia dalam rangka memantapkan landasan spiritual, moral, dan etika pembangunan bangsa.
2. **Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing** adalah mengedepankan pembangunan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing; meningkatkan penguasaan dan pemanfaatan iptek melalui penelitian;



pengembangan, dan penerapan menuju inovasi secara berkelanjutan; membangun infrastruktur yang maju serta reformasi di bidang hukum dan aparatur negara; dan memperkuat perekonomian domestik berbasis keunggulan setiap wilayah menuju keunggulan kompetitif dengan membangun keterkaitan sistem produksi, distribusi, dan pelayanan termasuk pelayanan jasa dalam negeri.

3. **Mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum** adalah memantapkan kelembagaan demokrasi yang lebih kokoh; memperkuat peran masyarakat sipil; memperkuat kualitas desentralisasi dan otonomi daerah; menjamin pengembangan media dan kebebasan media dalam mengomunikasikan kepentingan masyarakat; dan melakukan pembenahan struktur hukum dan meningkatkan budaya hukum dan menegakkan hukum secara adil, konsekuen, tidak diskriminatif, dan memihak rakyat kecil.
4. **Mewujudkan Indonesia aman, damai, dan bersatu** adalah membangun kekuatan TNI hingga melampaui kekuatan esensial minimum serta disegani di kawasan regional dan internasional; memantapkan kemampuan dan meningkatkan profesionalisme Polri agar mampu melindungi dan mengayomi masyarakat; mencegah tindak kejahatan, dan menuntaskan tindakan kriminalitas; membangun kapabilitas lembaga intelijen dan kontra-intelijen negara dalam penciptaan keamanan nasional; serta meningkatkan kesiapan komponen cadangan, komponen pendukung pertahanan dan kontribusi industri pertahanan nasional dalam sistem pertahanan semesta.
5. **Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan** adalah meningkatkan pembangunan daerah; mengurangi kesenjangan sosial secara menyeluruh, keberpihakan kepada masyarakat, kelompok dan wilayah/daerah yang masih lemah; menanggulangi kemiskinan dan pengangguran secara drastis; menyediakan akses yang sama bagi masyarakat terhadap berbagai pelayanan sosial serta sarana dan prasarana ekonomi; serta menghilangkan diskriminasi dalam berbagai aspek termasuk gender.
6. **Mewujudkan Indonesia asri dan lestari** adalah memperbaiki pengelolaan pelaksanaan pembangunan yang dapat menjaga keseimbangan antara pemanfaatan, keberlanjutan, keberadaan, dan kegunaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan tetap menjaga fungsi, daya dukung, dan kenyamanan dalam kehidupan pada masa kini dan masa depan, melalui pemanfaatan ruang yang serasi antara penggunaan untuk pemukiman, kegiatan sosial ekonomi, dan upaya konservasi; meningkatkan pemanfaatan ekonomi sumber daya alam dan lingkungan yang berkesinambungan; memperbaiki pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk mendukung kualitas kehidupan; memberikan

keindahan dan kenyamanan kehidupan; serta meningkatkan pemeliharaan dan pemanfaatan keanekaragaman hayati sebagai modal dasar pembangunan.

7. **Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional** adalah menumbuhkan wawasan bahari bagi masyarakat dan pemerintah agar pembangunan Indonesia berorientasi kelautan; meningkatkan kapasitas sumber daya manusia yang berwawasan kelautan melalui pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kelautan; mengelola wilayah laut nasional untuk mempertahankan kedaulatan dan kemakmuran; dan membangun ekonomi kelautan secara terpadu dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber kekayaan laut secara berkelanjutan.
8. **Mewujudkan Indonesia berperan penting dalam pergaulan dunia internasional** adalah memantapkan diplomasi Indonesia dalam rangka memperjuangkan kepentingan nasional; melanjutkan komitmen Indonesia terhadap pembentukan identitas dan pemantapan integrasi internasional dan regional; dan mendorong kerja sama internasional, regional dan bilateral antarmasyarakat, antarkelompok, serta antarlembaga di berbagai bidang.

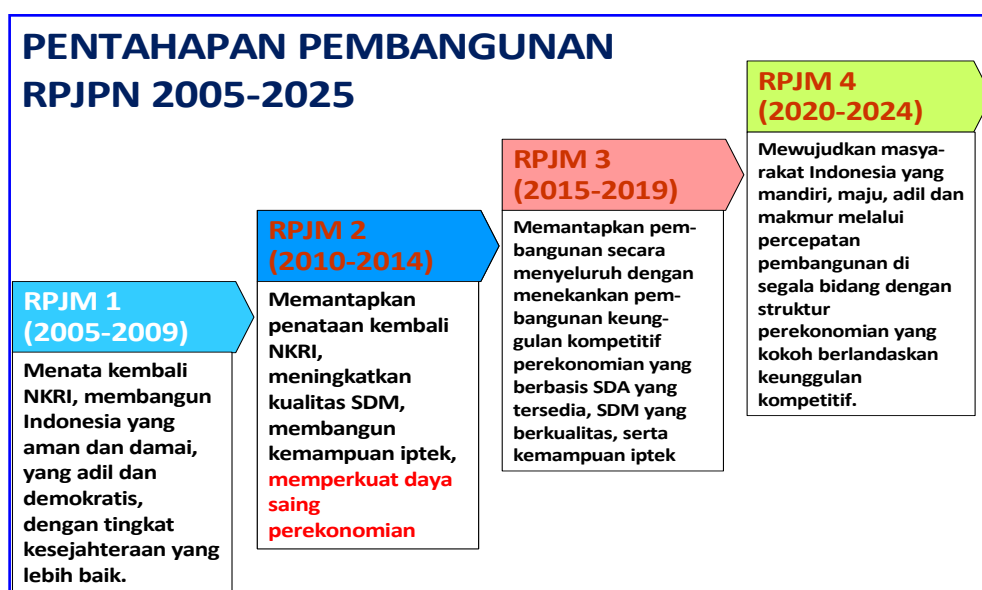
Strategi untuk melaksanakan Visi dan Misi tersebut dijabarkan secara bertahap dalam periode lima tahunan atau RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah). Masing-masing tahap mempunyai skala prioritas dan strategi pembangunan yang merupakan kesinambungan dari skala prioritas dan strategi pembangunan pada periode-periode sebelumnya.

Tahapan skala prioritas utama dan strategi RPJM secara ringkas adalah sebagai berikut:

1. **RPJM ke-1 (2005–2009)** diarahkan untuk menata kembali dan membangun Indonesia di segala bidang yang ditujukan untuk menciptakan Indonesia yang aman dan damai, yang adil dan demokratis, dan yang tingkat kesejahteraan rakyatnya meningkat.
2. **RPJM ke-2 (2010–2014)** ditujukan untuk lebih memantapkan penataan kembali Indonesia di segala bidang dengan menekankan pada upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia termasuk pengembangan kemampuan iptek serta penguatan daya saing perekonomian.
3. **RPJM ke-3 (2015–2019)** ditujukan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan iptek yang terus meningkat.
4. **RPJM ke-4 (2020–2025)** ditujukan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang

kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing.

GAMBAR 10
PENTAHAPAN PEMBANGUNAN DALAM RPJPN 2005-2025



3.2 Arah Pembangunan Jangka Menengah Ke-2 (2010—2014)

Berlandaskan pelaksanaan, pencapaian, dan sebagai keberlanjutan RPJM ke-1, RPJM ke-2 ditujukan untuk lebih memantapkan penataan kembali Indonesia di segala bidang dengan menekankan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia termasuk pengembangan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta penguatan daya saing perekonomian.

Kondisi aman dan damai di berbagai daerah Indonesia terus membaik dengan meningkatnya kemampuan dasar pertahanan dan keamanan negara yang ditandai dengan peningkatan kemampuan postur dan struktur pertahanan negara serta peningkatan kemampuan lembaga keamanan negara.

Kondisi itu sejalan dengan meningkatnya kesadaran dan penegakan hukum, tercapainya konsolidasi penegakan supremasi hukum dan penegakan hak asasi manusia, serta kelanjutan penataan sistem hukum nasional. Sejalan dengan itu, kehidupan bangsa yang lebih demokratis semakin terwujud ditandai dengan membaiknya pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah serta kuatnya peran masyarakat sipil dan partai politik dalam kehidupan bangsa. Posisi penting Indonesia

sebagai negara demokrasi yang besar makin meningkat dengan keberhasilan diplomasi di fora internasional dalam upaya pemeliharaan keamanan nasional, integritas wilayah, dan pengamanan kekayaan sumber daya alam nasional. Selanjutnya, kualitas pelayanan publik yang lebih murah, cepat, transparan, dan akuntabel makin meningkat yang ditandai dengan terpenuhinya standar pelayanan minimum di semua tingkatan pemerintah.

Kesejahteraan rakyat terus meningkat ditunjukkan oleh membaiknya berbagai indikator pembangunan sumber daya manusia, antara lain meningkatnya pendapatan per kapita; menurunnya angka kemiskinan dan tingkat pengangguran sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas disertai dengan berkembangnya lembaga jaminan sosial; meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat yang didukung dengan pelaksanaan sistem pendidikan nasional yang mantap; meningkatnya derajat kesehatan dan status gizi masyarakat; meningkatnya kesetaraan gender; meningkatnya tumbuh kembang optimal, kesejahteraan, dan perlindungan anak; terkendalinya jumlah dan laju pertumbuhan penduduk; menurunnya kesenjangan kesejahteraan antarindividu, antarkelompok masyarakat, dan antardaerah; dipercepatnya pengembangan pusat-pusat pertumbuhan potensial di luar Jawa; serta makin mantapnya nilai-nilai baru yang positif dan produktif dalam rangka memantapkan budaya dan karakter bangsa.

Daya saing perekonomian meningkat melalui penguatan industri manufaktur sejalan dengan penguatan pembangunan pertanian dan peningkatan pembangunan kelautan dan sumber daya alam lainnya sesuai dengan potensi daerah secara terpadu serta meningkatnya pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; percepatan pembangunan infrastruktur dengan lebih meningkatkan kerja sama antara pemerintah dan dunia usaha; peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan; serta penataan kelembagaan ekonomi yang mendorong prakarsa masyarakat dalam kegiatan perekonomian. Kondisi itu didukung oleh pengembangan jaringan infrastruktur transportasi, serta pos dan telematika; peningkatan pemanfaatan energi terbarukan, khususnya bioenergi, panas bumi, tenaga air, tenaga angin, dan tenaga surya untuk kelistrikan; serta pengembangan sumber daya air dan pengembangan perumahan dan permukiman. Bersamaan dengan itu, industri kelautan yang meliputi perhubungan laut, industri maritim, perikanan, wisata bahari, energi dan sumber daya mineral dikembangkan secara sinergi, optimal, dan berkelanjutan.

Dalam kerangka pencapaian pembangunan yang berkelanjutan, pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup makin berkembang melalui penguatan kelembagaan dan peningkatan kesadaran masyarakat yang ditandai dengan berkembangnya proses rehabilitasi dan konservasi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang disertai dengan menguatnya partisipasi aktif masyarakat; terpeliharanya keanekaragaman hayati dan kekhasan sumber daya alam tropis lainnya yang dimanfaatkan untuk mewujudkan nilai tambah, daya saing bangsa, serta modal pembangunan nasional pada masa yang akan datang; mantapnya kelembagaan dan kapasitas antisipatif serta penanggulangan bencana di setiap tingkatan pemerintahan;



serta terlaksananya pembangunan kelautan sebagai gerakan yang didukung oleh semua sektor. Kondisi itu didukung dengan meningkatnya kualitas perencanaan tata ruang serta konsistensi pemanfaatan ruang dengan mengintegrasikannya ke dalam dokumen perencanaan pembangunan dan penegakan peraturan dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang.

BAB IV

KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL 2010--2014

4.1 Strategi dan Kebijakan Pembangunan Nasional

4.1.1 Visi Indonesia

Indonesia memiliki modal yang sangat besar, baik sumber daya alam, letak geografis yang strategis, struktur demografis penduduknya yang ideal, sumber daya kultural yang beragam dan kuat, dan manusia-manusia yang memiliki potensi dan kreativitas yang tidak terbatas. Krisis dan tantangan telah diubah menjadi peluang dan kesempatan. Di bidang energi, Indonesia memiliki berbagai sumber energi mulai dari minyak bumi, gas, batubara dan sumber energi yang terbarukan yang melimpah seperti geotermal dan air. Di samping itu, tersedia lahan yang luas dan subur yang bisa ditanami oleh berbagai komoditas pangan dan pertanian. Penduduk Indonesia memiliki potensi tinggi di berbagai bidang, ilmu pengetahuan dan teknologi, kesenian dan budaya, olahraga, serta kreativitas.

Dengan perkiraan ekonomi dunia akan mengalami pemulihan secara bertahap, serta tidak lagi terjadi gejolak (*shock*) berskala global yang baru, maka kinerja ekonomi nasional juga akan pulih secara bertahap. Kinerja ekonomi Indonesia telah dan terus diupayakan untuk mengatasi dampak krisis dengan memacu potensi ekonomi dalam negeri. Dalam meniti upaya pemulihan ini, fondasi ekonomi dan stabilitas harus tetap dapat dipelihara dan bahkan harus diperkuat. Dengan kondisi itulah, rata-rata pertumbuhan ekonomi dalam lima tahun kedepan akan dapat dijaga pada kisaran 6,3%-6,8%. Jika pemulihan ekonomi global terjadi secara lebih cepat dan tidak terjadi gejolak ekonomi baru, melalui strategi penguatan ekonomi domestik dan penguatan ekspor, maka pertumbuhan ekonomi rata-rata tersebut dapat dipacu lebih tinggi dan pada akhir periode lima tahun ke depan mencapai 7% atau lebih. Dengan pertumbuhan ini, tingkat kemiskinan akan dapat diturunkan menjadi 8%-10% dan tingkat pengangguran terbuka menjadi 5%-6%.

Pengalaman lima tahun terakhir memberikan pelajaran bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi hanya dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat, bila disertai pemerataan kesejahteraan melalui kebijakan ekonomi yang berpihak nyata pada kelompok masyarakat yang paling lemah. Kebijakan ekonomi harus dengan pendekatan yang menyeluruh dan seimbang, konsisten dan adil. Kemiskinan terjadi bukan sekadar karena belum terpenuhinya kebutuhan pokok, tetapi kemiskinan terjadi karena tidak adanya hak dan akses untuk memenuhi kebutuhan pokok. Akses tidak hanya mencakup ketersediaan pasokan kebutuhan pokok yang berkualitas sesuai dengan lokasi kebutuhan, tetapi juga keterjangkauan harganya, dan keamanan pasokan sepanjang waktu. Oleh karena itu, rakyat Indonesia akan menjadi sejahtera bila hak dan aksesnya



untuk memenuhi kebutuhan dasarnya terjamin.

Mekanisme pasar dan globalisasi tidak dapat diandalkan untuk secara otomatis menyejahterakan rakyat. Bahkan, mekanisme pasar yang liberal tanpa batas telah membuahkan krisis keuangan global yang berdampak luas dan dapat menyengsarakan masyarakat dunia. Peranan pemerintah yang kuat, cerdas, bersih, dan efisien sangat penting dalam melindungi kelompok masyarakat yang rentan, dan menjaga kepentingan negara dan rakyat dari eksploitasi pasar yang tidak terbatas. Reformasi birokrasi dan peranan pemerintah yang efektif dan bebas dari konflik kepentingan menjadi suatu keharusan dalam menjaga kepentingan nasional dan masyarakat.

Pertumbuhan ekonomi dalam lima tahun terakhir telah mencapai hampir 6%, yang merupakan pertumbuhan tertinggi sejak krisis ekonomi terjadi tahun 1998. Tingkat pengangguran dan kemiskinan juga mengalami penurunan. Namun, tingkat pengangguran dan kemiskinan masih harus terus diturunkan. Saat ini masih banyak masyarakat yang hidup di sekitar dan di bawah garis kemiskinan. Kehidupan mereka masih sangat rentan terhadap berbagai gejolak, terutama gejolak harga pangan. Persoalan kemiskinan adalah persoalan yang harus ditangani secara lebih substantif dan mendasar.

Pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan menjamin pemerataan (*growth with equity*) mensyaratkan stabilitas dan dukungan fundamental negara yang kuat. Suatu proses pertumbuhan ekonomi yang mengikutsertakan semua lapisan masyarakat hanya tercapai bila keberpihakan dalam alokasi anggaran belanja pemerintah secara sungguh-sungguh, dirancang untuk membantu mereka keluar dari lingkaran kemiskinan. Perlindungan sosial, juga harus terus diberikan bukan hanya karena merupakan kewajiban konstitusional, namun juga karena pertimbangan strategis untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia yang produktif, terdidik, terampil, dan sehat. Manusia seperti ini akan menjadi modal berharga bagi bangsa yang kuat, kukuh dan berdaya saing dalam menghadapi berbagai tantangan, baik pada lingkup nasional, regional maupun global.

Perbaikan kualitas sumber daya manusia dalam lima tahun ini telah membuahkan hasil. Namun, usaha ini harus tetap dilanjutkan. Kita harus menunjukkan proses perjalanan sejarah bangsa ini dalam sebuah kontinuitas proses yang konsisten. Untuk menjamin berlangsungnya proses perbaikan itu, diperlukan sebuah sistem pemerintahan yang demokratis. Sebuah sistem yang memberikan jaminan akses kepada setiap rakyatnya untuk memenuhi kebutuhannya. Perbaikan kesejahteraan rakyat hanya dimungkinkan bila proses *checks and balances* berjalan dengan baik. Kebijakan untuk kesejahteraan rakyat terus menerus diuji melalui proses ini. Tujuannya, untuk menjamin bahwa kebijakan yang diambil memang bermanfaat dan ditujukan sebesar-besarnya untuk mencapai kemakmuran rakyat. Oleh karena itu, upaya konsolidasi demokrasi harus tetap dilanjutkan. Kebebasan berpendapat harus makin dijamin, dan pilar-pilar demokrasi harus makin ditegakkan yang diimbangi dengan peningkatan

kepatuhan terhadap pranata hukum.

Salah satu elemen penting di dalam demokrasi adalah aspek kesetaraan. Pembukaan UUD 1945 mengamanatkan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Amanat konstitusi mewajibkan negara untuk melindungi segenap warga negara tanpa membedakan paham, asal-usul, golongan, dan jender. Sejarah perjalanan bangsa mengajarkan bahwa demokrasi di Indonesia tidak bisa diletakkan dalam kerangka monolitik. Demokrasi Indonesia adalah sebuah sejarah keberagaman. Oleh karena itu, demokrasi menjamin keberagaman ini. Keberagaman yang telah dinyatakan dalam semboyan Bhineka Tunggal Eka tersebut harus terus dijaga dan dijadikan modal dasar kultural yang membuat Indonesia menjadi khas dibandingkan negara-negara lain di dunia.

Indonesia berhasil melalui sebuah proses transformasi politik dari negara otoriter menjadi sebuah negara dengan tatanan politik yang lebih demokratis. Konsolidasi demokrasi telah berhasil dilaksanakan dengan baik, melalui proses pemilihan umum baik di tingkat nasional maupun lokal. Ke depan, berbagai usaha harus dilakukan untuk membawa demokrasi prosedural ini menjadi demokrasi substansial. Upaya penguatan pilar-pilar demokrasi yang dapat sepenuhnya menjamin proses *checks and balances* harus dilakukan agar hak-hak rakyat dapat dijaga.

Di dalam konstitusi Indonesia, dengan tegas dinyatakan prinsip-prinsip pengawasan antarkekuasaan secara timbal balik dan berimbang. Konstitusi juga secara tegas memuat sejumlah pasal yang berisi pengakuan terhadap hak asasi manusia. Sebagai negara hukum yang demokratis, supremasi hukum, pemerintahan yang bertanggung jawab, partisipatif dan terbuka, serta penghargaan terhadap hak asasi manusia, mutlak harus diwujudkan.

Indonesia saat ini telah menjadi sebuah negara dengan tata kelola pemerintah yang lebih baik, lebih bersih dan lebih berwibawa dan bebas dari berbagai kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan. Upaya ini harus terus diperkuat untuk mewujudkan Indonesia yang bersih, berwibawa dan bebas KKN serta memberikan pelayanan publik yang baik, efisien dan murah bagi berbagai pelaku kepentingan, sehingga dihormati oleh dunia internasional.

Memperhatikan uraian di atas dan mencermati tantangan ke depan, maka kerangka Visi Indonesia 2014 adalah :

“TERWUJUDNYA INDONESIA YANG SEJAHTERA, DEMOKRATIS, DAN BERKEADILAN”

dengan penjelasan sebagai berikut:

Kesejahteraan Rakyat. Terwujudnya peningkatan kesejahteraan rakyat, melalui pembangunan ekonomi yang berlandaskan pada keunggulan daya saing,



kekayaan sumber daya alam, sumber daya manusia dan budaya bangsa. Tujuan penting ini dikelola melalui kemajuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Demokrasi. Terwujudnya masyarakat, bangsa dan negara yang demokratis, berbudaya, bermartabat dan menjunjung tinggi kebebasan yang bertanggung jawab serta hak asasi manusia.

Keadilan. Terwujudnya pembangunan yang adil dan merata, yang dilakukan oleh seluruh masyarakat secara aktif, yang hasilnya dapat dinikmati oleh seluruh bangsa Indonesia.

4.1.2 Misi Pembangunan

Keberhasilan penyelenggaraan pembangunan yang telah menuai beragam hasil pada periode 2004-2009, tentu harus terus dipelihara dan ditumbuh-kembangkan. Capaian dan prestasi pembangunan di periode 2004-2009 itu, pada hakekatnya adalah salah satu modal dasar yang harus dilanjutkan untuk meraih capaian dan prestasi pembangunan yang lebih baik lagi, pada periode lima tahun yang akan datang, 2010-2014. Pada periode 2010-2014, bangsa Indonesia harus terus berupaya keras untuk mencapai perbaikan di bidang kesejahteraan rakyat, membangun keadilan, penerapan tata kelola pemerintahan yang baik, peningkatan kualitas demokrasi, serta menjaga kesatuan dan keamanan negara.

Misi Pembangunan Indonesia 2010-2014 merupakan bagian awal dari proses menuju cita-cita tersebut. Dalam menjalankan misinya, Indonesia tidak dapat terlepas dari pengaruh kondisi regional dan pengaruh global. Krisis dan gejolak harga pangan dan energi serta krisis ekonomi global yang terjadi sejak awal 2008 dan belum pulih sepenuhnya hingga saat ini, telah mempengaruhi kondisi dunia. Ekonomi dunia mengalami kontraksi ekonomi pada tahun 2009, yang disebabkan rusaknya lembaga-lembaga keuangan dunia yang pada akhirnya akan mempengaruhi secara negatif kegiatan ekonomi riil dan perdagangan dunia. Pada akhirnya tingkat kesejahteraan masyarakat dunia akan mengalami penurunan, dan target penurunan kemiskinan global pada 2015 seperti yang tertuang dalam Millenium Development Goals (MDG) juga akan mengalami hambatan.

Meskipun pada tingkat pimpinan dunia terdapat inisiatif untuk mengatasi krisis global, antara lain, yang telah dilakukan oleh forum G-20, namun pemulihan ekonomi global sepenuhnya masih akan memerlukan proses yang cukup panjang. Hal ini disebabkan perbaikan kembali sektor keuangan, memperbaiki regulasi dan pengawasan sektor keuangan, melakukan program counter cyclical melalui stimulus fiskal, dan mencegah proteksionisme dengan terus menjaga arus perdagangan antarnegara membutuhkan koordinasi yang rumit antarnegara, selain juga melalui proses politik di masing-masing negara yang tidak mudah.

Sementara itu, munculnya kesadaran kolektif global mengenai masalah perubahan iklim (climate change) juga akan mempengaruhi strategi pembangunan di semua negara. Setiap negara, baik yang sudah maju maupun yang sedang berkembang memiliki tanggung jawab yang sama meskipun dengan peran serta cara yang berbeda-beda dalam mengatasi masalah perubahan iklim global. Wujud dari makin maraknya kesadaran kolektif global atas dampak dari fenomena perubahan iklim adalah makin mengemukanya strategi pembangunan ekonomi yang harus menempatkan kesadaran akan daya dukung lingkungan alam pada prioritas yang tinggi. Bila hal tersebut tidak dilakukan, rangkaian bencana alam akibat ulah manusia dan dampak industrialisasi akan makin sering terjadi dan dapat membahayakan umat manusia sendiri.

Upaya Indonesia untuk memperbaiki kesejahteraan rakyat pada periode 2010-2014 masih akan dibayangi oleh kondisi krisis ekonomi global dan agenda perubahan iklim (climate change) tersebut. Indonesia memiliki potensi untuk mencapai pertumbuhan ekonomi rata-rata 6,3%-6,8% pada periode 2010-2014 dengan asumsi perekonomian global tidak akan mengalami pemburukan dalam periode 2010, stabilitas sektor keuangan dunia sudah pulih, serta harga komoditas pangan dan energi menyesuaikan secara bertahap dan tidak mengalami gejolak tajam.

Indonesia memiliki potensi geografi yang strategis yang ditopang oleh sumber daya alam yang memadai, warisan luhur budaya yang kuat, dan sumber daya manusia yang besar dan mendapat pendidikan makin baik dari waktu ke waktu. Dalam lima belas tahun mendatang, komposisi penduduk usia produktif masih akan meningkat, yang berarti menjadi tantangan dan sekaligus kesempatan bagi Indonesia untuk melakukan investasi sumber daya manusia yang bermutu dan berkesinambungan untuk menciptakan bangsa yang memiliki daya saing yang makin tinggi.

Bangsa Indonesia saat ini menjadi model transisi demokrasi dunia – yang sebelumnya diragukan keberhasilannya akibat kompleksitas dan heterogenitasnya. Proses desentralisasi sistem pemerintahan yang telah dijalankan dari waktu ke waktu telah menunjukkan perkembangan yang menggembirakan. Demokrasi dan desentralisasi adalah suatu kombinasi yang kompatibel dan dapat menjadi kekuatan yang dahsyat dalam tatanan ekonomi dan politik global. Untuk mewujudkannya diperlukan upaya yang secara konsisten terus membangun lembaga pemerintahan yang kompeten, bersih, dan dapat dipercaya melalui proses reformasi yang konsisten.

Misi pembangunan 2010-2014 adalah rumusan dari usaha-usaha yang diperlukan untuk mencapai visi Indonesia 2014, yaitu terwujudnya Indonesia Sejahtera, Demokratis dan Berkeadilan, namun tidak dapat terlepas dari kondisi dan tantangan lingkungan global dan domestik pada kurun waktu 2010-2014 yang mempengaruhinya. Misi pemerintah dalam periode 2010-2014 diarahkan untuk mewujudkan Indonesia yang lebih sejahtera, aman dan damai, serta meletakkan fondasi yang lebih kuat bagi Indonesia yang adil dan demokratis. Usaha-usaha Perwujudan visi Indonesia 2014 akan dijabarkan dalam misi pemerintah tahun 2010-2014 sebagai berikut.



Misi 1: Melanjutkan Pembangunan Menuju Indonesia yang Sejahtera

Pembukaan UUD 1945 secara tegas menyatakan bahwa Indonesia yang sejahtera merupakan tujuan akhir dari pembentukan negara Indonesia. Kesejahteraan rakyat tidak hanya diukur secara material, tetapi juga secara rohani yang memungkinkan rakyat Indonesia menjadi manusia yang utuh dalam mengejar cita-cita ideal, dan berpartisipasi dalam proses pembangunan secara kreatif, inovatif, dan konstruktif.

Pembangunan menuju Indonesia yang sejahtera mengandung pengertian yang dalam dan luas, mencakup keadaan yang mencukupi dan memiliki kemampuan bertahan dalam mengatasi gejolak yang terjadi, baik dari luar maupun dari dalam. Ancaman krisis energi dan pangan yang terjadi pada periode 2005-2008 dengan harga komoditas pangan dan energi mengalami gejolak naik dan turun secara amat tajam dalam kurun waktu yang sangat cepat, telah mengakibatkan banyak rakyat merasa terancam kesejahteraannya meskipun pemerintah telah berupaya melindungi masyarakat melalui kebijakan subsidi pangan dan energi yang sangat besar. Dengan demikian, membangun dan mempertahankan ketahanan pangan (*food security*) dan ketahanan energi (*energy security*) secara berkelanjutan merupakan salah satu elemen penting dalam misi mencapai kesejahteraan rakyat Indonesia.

Sesuai dengan tantangan perubahan iklim yang semakin nyata, pembangunan ekonomi Indonesia harus mengarusutamakan masalah lingkungan di dalam strateginya melalui kebijakan adaptasi dan mitigasi. Kerusakan lingkungan hidup yang telah terjadi terus diperbaiki, melalui kebijakan antara lain: rehabilitasi hutan dan lahan, peningkatan pengelolaan daerah aliran sungai, dan pengembangan energi dan transportasi yang ramah lingkungan, pengendalian emisi gas rumah kaca (GRK) dan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan.

Krisis keuangan global yang menghancurkan sendi-sendi perekonomian global, terjadinya gejolak harga pangan dan energi di seluruh dunia, serta makin pentingnya isu perubahan iklim global dalam beberapa tahun ini, akan mengakibatkan tuntutan dan reaksi akan perubahan dasar dalam tatanan ekonomi dunia. Tatanan ekonomi global yang baru harus mengedepankan aspek kemakmuran masyarakat dunia secara bersama, merata, adil dan berkelanjutan. Untuk itu, model pembangunan ekonomi yang tidak memberikan ruang dan peran yang penting serta proporsional bagi munculnya negara-negara berkembang tidak dapat terus dipertahankan. Koreksi terhadap kebebasan pasar yang tanpa batas, tanpa disertai regulasi dan pengawasan yang cukup, untuk menjaga aspek keadilan dan kepentingan masyarakat luas, harus dilakukan. Pasar harus dilindungi dari tindakan dan keputusan pelaku pasar yang sembrono dan tamak yang hanya memperhitungkan keuntungan bisnis pribadi dalam jangka pendek, dengan mengesampingkan azas kehati-hatian, kepatutan, dan keberlanjutan.

Situasi ini mengharuskan Indonesia untuk mampu mengantisipasi dan harus tercermin dalam penetapan misi dan arah kebijakan pembangunan Indonesia, serta

dalam langkah dan peran strategis Indonesia di dunia Internasional. Hal ini untuk menjamin agar Indonesia dapat terus mencapai cita-cita kemandirian dan kemajuan dalam kemakmuran rakyatnya. Keberhasilan bangsa Indonesia dalam menghadapi dan mengatasi krisis ekonomi dan transisi demokrasi yang sangat rumit dalam satu dasawarsa ini, serta kesiapan yang terus ditingkatkan dalam mengelola dampak krisis keuangan global, akan menjamin terpeliharanya momentum perbaikan kesejahteraan rakyat. Keberhasilan ini juga menandai bangkitnya Indonesia kembali dalam kancah internasional serta memperoleh respek dunia karena kebangkitan Indonesia tersebut dibangun atas dasar prinsip-prinsip universal yang mulia, yaitu azas tata kelola yang baik dan bersih (*good governance and clean government*), penghormatan kepada Hak Azasi Manusia, pluralisme, demokrasi, transparansi dan keterbukaan, akuntabilitas, serta berpartisipasi dalam tanggung jawab memelihara keseimbangan lingkungan alam dan keamanan dunia.

Di dalam negeri, tuntutan perbaikan kesejahteraan telah memasuki tahapan baru. Lapangan kerja yang tercipta harus mampu memberikan nilai tambah yang tinggi, baik secara ekonomis maupun harkat hidup manusia (*decent jobs*). Rakyat berhak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Hal ini hanya dapat diciptakan bila ekonomi tumbuh secara cukup tinggi, sehat, dan dibangun di atas prinsip tata kelola yang baik, efisisen, dan terus menjaga keadilan.

Kemajuan ekonomi, juga telah mendorong perubahan struktural dalam banyak elemen bangsa Indonesia. Pembangunan ekonomi yang terkonsentrasi di perkotaan, dan mengakibatkan tingginya urbanisasi dari wilayah perdesaan ke wilayah perkotaan serta menyebabkan kesenjangan kesejahteraan antara perdesaan-perkotaan, memerlukan perhatian tidak saja diberikan kepada perkotaan, namun juga perlu diberikan kepada perdesaan dengan menciptakan daya tarik wilayah perdesaan serta keterkaitan pembangunan ekonomi antara desa-kota. Pembangunan perkotaan yang difokuskan kepada sarana prasarana pelayanan publik perkotaan, harus memperhatikan pembangunan potensi sosial budaya heterogen, khususnya di kota-kota metropolitan dan kota besar. Dalam hal keterkaitan desa-kota yang dibutuhkan dalam mengurangi kesenjangan kesejahteraan, maka pembangunan perkotaan harus memperhatikan pembangunan kota-kota menengah dan kota-kota kecil di sekitarnya.

Misi 2: Memperkuat Pilar-Pilar Demokrasi

Indonesia telah tumbuh sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia. Proses demokrasi yang berjalan dalam lima tahun terakhir ini menunjukkan proses demokrasi yang makin matang dan makin dewasa. Meskipun demikian, masih diperlukan penyempurnaan struktur politik yang dititikberatkan pada proses pelembagaan demokrasi dengan menata hubungan antara kelembagaan politik dan kelembagaan pertahanan keamanan dalam kehidupan bernegara. Penyempurnaan struktur politik, juga harus dititik-beratkan pada peningkatan kinerja lembaga-lembaga



penyelenggara negara dalam menjalankan kewenangan dan fungsi-fungsi yang diberikan oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan.

Seiring dengan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah, proses demokrasi di berbagai daerah yang ditandai dengan pemilihan langsung kepala daerah, baik gubernur, bupati, maupun walikota oleh rakyat telah dilakukan di seluruh pelosok tanah air. Demokrasi telah berjalan pada arah yang benar. Di era reformasi dan demokratisasi saat ini, penataan proses politik yang dititikberatkan pada pengalokasian/representasi kekuasaan harus terus diwujudkan dengan meningkatkan secara terus menerus kualitas proses dan mekanisme seleksi publik yang lebih terbuka bagi para pejabat politik dan publik serta mewujudkan komitmen politik yang tegas terhadap pentingnya kebebasan media massa serta keleluasaan berserikat, berkumpul, dan berpendapat setiap warga negara berdasarkan aspirasi politiknya masing-masing.

Pengembangan budaya politik yang dititikberatkan pada penanaman nilai-nilai demokratis terus diupayakan melalui penciptaan kesadaran budaya dan penanaman nilai-nilai politik demokratis, terutama penghormatan nilai-nilai HAM, nilai-nilai persamaan, anti-kekerasan, serta nilai-nilai toleransi, melalui berbagai wacana dan media serta upaya mewujudkan berbagai wacana dialog bagi peningkatan kesadaran mengenai pentingnya memelihara persatuan bangsa.

Penguatan pilar-pilar demokrasi yang sehat, harus terus dibangun menuju demokrasi yang lebih matang dan dewasa. Perbedaan dan benturan kepentingan serta sikap kritis berbagai pihak terhadap pemerintah, merupakan realitas kehidupan demokrasi dan merupakan hak politik yang harus dihormati. Yang penting, semua itu harus tetap berada dalam bingkai konstitusi, aturan main dan etika yang harus sama-sama dijunjung tinggi sehingga stabilitas yang dinamis dan menampung berbagai perbedaan aspirasi, tetap dapat dijaga bersama. Karena itulah, mewujudkan masyarakat yang demokratis dengan tetap berlandaskan pada aturan hukum terus dibangun melalui pemantapan kelembagaan demokrasi yang lebih kokoh; memperkuat peran masyarakat sipil; memperkuat kualitas desentralisasi dan otonomi daerah; menjamin pengembangan media dan kebebasan media dalam mengomunikasikan kepentingan masyarakat; dan melakukan pembenahan struktur hukum dan meningkatkan budaya hukum serta menegakkan hukum secara adil, konsekuen, tidak diskriminatif, dan memihak pada rakyat kecil.

Misi 3: Memperkuat Dimensi Keadilan di Semua Bidang

Pembangunan yang adil dan merata, serta dapat dinikmati oleh seluruh komponen bangsa di berbagai wilayah Indonesia akan meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan, mengurangi gangguan keamanan, serta menghapuskan potensi konflik sosial untuk tercapainya Indonesia yang maju, mandiri dan adil.

Percepatan pembangunan dan pertumbuhan wilayah-wilayah strategis dan cepat tumbuh, perlu didorong sehingga dapat melahirkan rasa keadilan bagi masyarakat di berbagai daerah dengan mengembangkan wilayah-wilayah tertinggal di sekitarnya dalam suatu sistem wilayah pengembangan ekonomi yang sinergis, tanpa mempertimbangkan batas wilayah administrasi, tetapi lebih ditekankan pada pertimbangan keterkaitan mata-rantai proses industri dan distribusi. Upaya itu dapat dilakukan melalui pengembangan produk unggulan daerah, serta mendorong terwujudnya koordinasi, sinkronisasi, keterpaduan dan kerja sama antarsektor, antarpemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam mendukung peluang berusaha dan investasi di daerah.

Pendekatan pembangunan ke depan harus dilakukan dengan mengedepankan rasa keadilan dan pemerataan, selain dengan pemberdayaan masyarakat secara langsung melalui skema pemberian dana alokasi khusus, termasuk jaminan pelayanan publik dan keperintisan.

Wilayah-wilayah perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar perlu dikembangkan dengan mengubah arah kebijakan pembangunan yang selama ini cenderung berorientasi *inward looking* menjadi *outward looking* sehingga dapat dimanfaatkan sebagai pintu gerbang aktivitas ekonomi dan perdagangan dengan negara tetangga. Pendekatan pembangunan yang dilakukan, selain menggunakan pendekatan yang bersifat keamanan, juga diperlukan pendekatan kesejahteraan, keadilan, dan pemerataan. Perhatian khusus diberikan bagi pengembangan pulau-pulau kecil di perbatasan yang selama ini luput dari perhatian .

Keadilan dalam pembangunan, juga perlu ditunjukkan dengan pembangunan yang merata di semua bidang, baik pembangunan antara kota-kota metropolitan, besar, menengah, dan kecil yang diseimbangkan pertumbuhannya baik dengan mengacu pada sistem pembangunan perkotaan nasional maupun pembangunan di berbagai bidang yang terkait dengan peningkatan kesejahteraan rakyat. Keadilan dalam pemerataan pembangunan diperlukan untuk mencegah terjadinya pertumbuhan fisik kota yang tidak terkendali serta untuk mengendalikan arus migrasi langsung dari desa ke kota-kota besar dan metropolitan, dengan cara menciptakan kesempatan kerja dan peluang usaha di kota-kota menengah dan kecil, terutama di luar Pulau Jawa. Oleh karena itu, harus dilakukan peningkatan keterkaitan kegiatan ekonomi sejak tahap awal.

Dalam kaitan itu, percepatan pembangunan kota-kota kecil dan menengah yang telah berjalan selama ini harus terus ditingkatkan, terutama di luar Pulau Jawa, sehingga diharapkan dapat menjalankan perannya sebagai penggerak pembangunan wilayah-wilayah di sekitarnya dan melayani kebutuhan warga kotanya. Pendekatan pembangunan yang perlu dilakukan, antara lain, dengan memenuhi kebutuhan pelayanan dasar perkotaan sesuai dengan tipologi kota masing-masing.

Di sisi lain, pembangunan perdesaan harus terus didorong melalui pengembangan agroindustri padat pekerja, terutama bagi kawasan yang berbasis

pertanian dan kelautan; peningkatan kapasitas sumber daya manusia di perdesaan khususnya dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam melalui penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna; pengembangan jaringan infrastruktur penunjang kegiatan produksi di kawasan perdesaan dan kota-kota kecil terdekat dalam upaya menciptakan keterkaitan fisik, sosial, dan ekonomi yang saling melengkapi dan saling menguntungkan; peningkatan akses informasi dan pemasaran, lembaga keuangan, kesempatan kerja, dan teknologi; pengembangan *social capital* dan *human capital* yang belum tergali potensinya sehingga kawasan perdesaan tidak semata-mata mengandalkan sumber daya alam saja; serta intervensi harga dan kebijakan perdagangan yang berpihak ke produk pertanian, terutama terhadap harga dan upah.

Dalam rangka pembangunan berkeadilan, pembangunan kesejahteraan sosial juga dilakukan dengan memberi perhatian yang lebih besar pada kelompok masyarakat yang kurang beruntung, termasuk masyarakat miskin dan masyarakat yang tinggal di wilayah terpencil, tertinggal, dan wilayah bencana. Pembangunan kesejahteraan sosial dalam rangka memberikan perlindungan pada kelompok masyarakat yang kurang beruntung disempurnakan melalui penguatan lembaga jaminan sosial yang didukung oleh peraturan-peraturan perundang-undangan, pendanaan, serta penerapan sistem nomor induk kependudukan (NIK) tunggal. Pemberian jaminan sosial dilaksanakan dengan mempertimbangkan budaya dan kelembagaan yang sudah berakar di masyarakat.

Untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender, peningkatan akses dan partisipasi perempuan dalam pembangunan harus dilanjutkan. Demikian pula peningkatan kualitas perlindungan perempuan dan anak dilanjutkan. Keberadaan berbagai fasilitas yang telah dibangun pada periode 2004-2009, antara lain, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Pusat Krisis Terpadu, dan Ruang Pelayanan Khusus di sejumlah provinsi dan kabupaten/ kota, harus terus kita perluas di seluruh pelosok tanah air. Untuk mewujudkan peningkatan peran kaum perempuan dalam pembangunan, peran kaum perempuan di sektor publik harus terus ditingkatkan. Untuk itu, harus terus diperluas ruang untuk meningkatnya peran, keterlibatan aktif dan bahkan kepemimpinan kaum perempuan di luar pemerintahan, di dunia usaha dan organisasi sosial.

4.1.3 Agenda Pembangunan

Dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan nasional 2009-2014, ditetapkan lima agenda utama pembangunan nasional tahun 2009-2014, yaitu:

- Agenda I : Pembangunan Ekonomi dan Peningkatan Kesejahteraan Rakyat
- Agenda II : Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan
- Agenda III : Penegakan Pilar Demokrasi
- Agenda IV : Penegakkan Hukum Dan Pemberantasan Korupsi

Agenda V : Pembangunan Yang Inklusif Dan Berkeadilan

Agenda I: Pembangunan Ekonomi dan Peningkatan Kesejahteraan Rakyat

Agenda peningkatan kesejahteraan rakyat tetap menjadi prioritas dari pemerintah mendatang. Wujud akhir dari perbaikan kesejahteraan akan tercermin pada peningkatan pendapatan, penurunan tingkat pengangguran dan perbaikan kualitas hidup rakyat. Perbaikan kesejahteraan rakyat dapat diwujudkan melalui sejumlah program pembangunan untuk penanggulangan kemiskinan dan penciptaan kesempatan kerja, termasuk peningkatan program di bidang pendidikan, kesehatan, dan percepatan pembangunan infrastruktur dasar.

Pelaksanaan pembangunan pada periode 2004-2009 telah meletakkan fondasi dalam berbagai bidang perbaikan kesejahteraan rakyat, termasuk masyarakat miskin. Beberapa landasan kebijakan tersebut adalah: (i) penyusunan data dasar (dengan nama dan alamat) rumah tangga sangat miskin, miskin, dan hampir miskin yang sangat penting untuk mengarahkan program perlindungan dan bantuan sosial; (ii) pengelompokan program-program penanggulangan kemiskinan untuk mempermudah dan memperjelas koordinasi; (iii) harmonisasi dan integrasi program-program pemberdayaan masyarakat dalam PNPM Mandiri; (iv) regulasi yang mengatur koordinasi penanggulangan kemiskinan dari pusat sampai ke daerah, termasuk tanggung jawab pelaksanaannya secara bersama. Adanya fondasi tersebut tercermin pada pelaksanaan program Jamkesmas, beasiswa untuk siswa miskin, Raskin, PNPM Mandiri dan Kredit untuk Usaha Rakyat. Hasil yang telah dicapai antara lain tercermin pada penurunan kemiskinan dan penurunan tingkat pengangguran serta tercapainya berbagai sasaran lain dalam *Millineum Development Goals*.

Program pembangunan 2010--2014 tetap konsisten untuk melanjutkan berbagai program perbaikan kesejahteraan rakyat yang sudah berjalan dengan memberikan penekanan lebih lanjut dalam membuat kebijakan yang lebih efektif dan terarah dalam bentuk pengarusutamaan anggaran dan kebijakan. Pengarusutamaan ini tidak hanya terbatas antarsektor tetapi juga antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pengarusutamaan harus juga mencakup kebijakan agar tujuan dapat tercapai dengan sumber daya yang minimal.

Penyelenggaraan program peningkatan kesejahteraan rakyat akan dilaksanakan seiring dengan upaya peningkatan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Peningkatan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi akan mendukung terciptanya penyelenggaraan program pembangunan ekonomi yang makin berkualitas, yaitu pembangunan ekonomi yang berlandaskan pada peningkatan produktivitas dan daya saing, serta makin memacu terciptanya kreativitas dan inovasi. Penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi juga akan mempercepat tercapainya tataran pembangunan ekonomi yang makin mandiri.



Penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi diarahkan untuk tercapainya peningkatan kapasitas dan kemampuan bangsa dalam memadukan sumber daya alam (*resource based*), sumber daya pengetahuan (*knowledge based*) dan sumber daya yang berasal dari warisan tradisi budaya bangsa (*culture based*). Dengan cara itu, akan diperoleh ranah pembangunan ekonomi produktif yang makin luas, antara lain, ekonomi kreatif --*creative economy*--, yang dapat memberikan peran konstruktif untuk mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi.

Program peningkatan kesejahteraan dilakukan melalui mendorong sektor riil dan pemihakan kepada usaha kecil menengah dan koperasi serta terus menjaga stabilitas ekonomi makro. Upaya-upaya menggerakkan sektor riil telah dan akan terus dilakukan melalui berbagai intervensi pemerintah yang konstruktif dan terukur. Sedangkan pelaksanaan kebijakan ekonomi makro (fiskal dan moneter) dilakukan selaras dengan tujuan mengelola ekonomi secara sehat dan berkelanjutan. Kebijakan tersebut dapat membuahkan hasil apabila didukung oleh birokrasi yang efektif, efisien dan bebas dari konflik kepentingan.

Agenda II. Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan

Perbaikan tata kelola pemerintahan yang baik menjadi isu yang penting dalam konteks nasional dan internasional. Krisis ekonomi yang lalu tidak terlepas dari buruknya tata kelola pemerintahan, baik di sektor pemerintahan maupun swasta. Krisis keuangan global, juga tidak terlepas dari masalah ini. Oleh karena itu, negara-negara yang tergabung dalam G-20 sepakat untuk menempatkan perbaikan tatakelola pemerintahan menjadi salah satu agenda perbaikan untuk mencegah krisis berulang. Wujud dari perbaikan tata kelola pemerintahan ini antara lain dapat dilihat dari penurunan tingkat korupsi, perbaikan pelayanan publik, dan pengurangan ekonomi biaya tinggi.

Di sisi lain, indeks persepsi korupsi terus membaik secara signifikan. Hal ini memberikan indikasi bahwa upaya keras pemerintah untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan selama lima tahun terakhir telah berada pada arah yang benar. Meskipun demikian, capaian selama periode sebelumnya masih belum memadai. Perlu upaya yang lebih keras dan sistematis untuk memperbaiki praktik tata kelola pemerintahan ini.

Pembangunan birokrasi yang kuat merupakan elemen penting untuk menjaga agar kelangsungan pembangunan tetap berkelanjutan. Untuk itu, reformasi birokrasi akan dilaksanakan di seluruh kementerian/lembaga untuk selanjutnya diteruskan di pemerintah daerah. Selanjutnya dalam penyusunan perencanaan dan anggaran, akan diterapkan sistem anggaran berbasis kinerja secara menyeluruh. Reformasi ini diharapkan dapat membuahkan hasil yang positif khususnya dalam perbaikan kualitas pelayanan publik, efektivitas dan akuntabilitas kegiatan kementerian/lembaga dan penanggulangan korupsi.

Langkah-langkah yang disebutkan di atas, akan dipercepat dengan memantapkan dan memperluas program percepatan reformasi birokrasi yang dikombinasikan dengan sejumlah program aksi lainnya seperti reformasi bidang hukum.

Cakupan perbaikan dalam tata kelola pemerintahan tidak hanya terbatas pada sektor pemerintahan, tetapi juga meliputi sektor swasta termasuk pengelolaan BUMN. Untuk mendorong perbaikan tata kelola swasta, pemerintah akan mendorong lebih banyak perusahaan untuk mengubah statusnya menjadi perusahaan publik. Perubahan ini akan mendorong keterbukaan dan akuntabilitas publik dari sektor korporasi di Indonesia. Hal ini juga penting untuk mencegah kolusi, nepotisme, serta konflik kepentingan yang dapat mengganggu roda perekonomian.

Agenda III. Penegakan Pilar Demokrasi

Transisi dari kehidupan demokrasi masa lalu dengan segala keberhasilan dan kegagalannya menuju Indonesia masa depan yang lebih sejahtera, demokratis, dan adil menuntut penegakan pilar-pilar demokrasi yang lebih konsisten. Oleh karena itu agenda penegakan pilar demokrasi merupakan agenda yang tetap penting dalam periode 2010-2014.

Wujud dari Indonesia yang demokratis adalah penghargaan terhadap hak asasi manusia, terjaminnya kebebasan berpendapat, adanya checks and balances, jaminan akan keberagaman yang tercermin dengan adanya perlindungan terhadap segenap warga negara tanpa membedakan paham, asal-usul, golongan, dan gender.

Selama ini, konsolidasi demokrasi telah dilakukan dengan menjamin kebebasan berpendapat, menghormati hak asasi manusia, serta terus menjaga berjalannya proses checks and balances. Lembaga-lembaga demokrasi terus diperkuat dengan cara memberikan contoh dan menegakkan nilai-nilai demokrasi, misalnya dengan menjaga kebebasan berpendapat, kebebasan pers, dan mengutamakan supremasi hukum. Demokrasi harus terus dijaga agar berada pada arah yang benar, yaitu demokrasi yang egaliter.

Selain itu, di dalam konsolidasi demokrasi telah berhasil dilakukan pemilihan umum baik di tingkat nasional maupun lokal. Pembangunan demokrasi diarahkan untuk mencapai pada tingkat demokrasi yang substansial. Namun, sebelum bisa beranjak kepada demokrasi substansial harus diselesaikan terlebih dahulu semua masalah prosedural. Di dalam proses pemilihan umum misalnya, tidak boleh terulang kesalahan dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang membawa persoalan, baik di dalam pemilihan umum legislatif maupun pemilihan kepala negara dan kepala daerah. Ke depan, berbagai usaha perbaikan harus dilakukan, sebelum melangkah menuju demokrasi substansial



Agenda IV. Penegakan Hukum

Sistem yang demokratis juga harus disertai tegaknya "rule of law." Oleh karena itu, agenda penegakan hukum masih merupakan agenda yang penting dalam periode 2010-2014. Wujud dari penegakan hukum adalah munculnya kepastian hukum bagi seluruh rakyat Indonesia. Kepastian hukum akan memberikan rasa aman, rasa adil dan kepastian berusaha bagi masyarakat. Terkait dengan kepastian usaha, salah satu persoalan yang dianggap kerap mengganggu masuknya investasi ke Indonesia adalah lemahnya kepastian hukum. Karenanya penegakan hukum akan membawa dampak yang positif bagi perbaikan iklim investasi yang pada gilirannya akan memberi dampak positif bagi perekonomian Indonesia

Agenda dalam bidang hukum juga mencakup proses pembuatan undang-undang, proses penjabarannya, proses pengawasan, dan juga penegakan aturan hukum. Selain itu, wujud dari agenda hukum adalah menjamin proses peradilan yang bebas. Hal ini semua akan membantu di dalam upaya konsolidasi demokrasi. Penegakan hukum merupakan elemen yang sangat penting di dalam pemberantasan korupsi.

Selama ini, telah dan terus dilakukan pembenahan pada substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Tumpang tindih dan inkonsistensi peraturan perundang-undangan harus diperkecil. Demikian juga hambatan pada implementasi peraturan perundangan harus dihilangkan. Akan terus diupayakan perjanjian ekstradisi dengan negara-negara yang berpotensi menjadi tempat pelarian pelaku tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya. Dalam usaha pemberantasan korupsi, berbagai kasus telah ditindaklanjuti tanpa pandang bulu. Proses penegakan hukum dalam bidang korupsi dilakukan tanpa tebang pilih. Semua warga negara sama kedudukannya di muka hukum.

Selanjutnya, permasalahan terkait dengan struktur hukum akan diatasi dengan peningkatan independensi dan akuntabilitas kelembagaan hukum, peningkatan kemampuan sumber daya manusia di bidang hukum, serta mendorong berlakunya sistem peradilan yang transparan dan terbuka. Oleh karena itu, semua pihak, baik pemerintah, pengusaha, maupun aparat penegak hukum mulai dari polisi dan jaksa sampai kepada hakim dan pengacara benar-benar harus menegakkan aturan main dan tatanan hukum yang pasti agar hukum semakin tegak dan pasti.

Agenda V. Pembangunan yang Inklusif dan Berkeadilan

Peningkatan kualitas pembangunan yang inklusif dan berkeadilan terus menjadi agenda prioritas dalam pemerintahan 2010-2014 mengingat pelaksanaan agenda keadilan sampai saat ini belum mampu mewujudkan sepenuhnya hasil yang diinginkan. Penyebabnya antara lain proses pembangunan yang tidak partisipatif belum banyak diterapkan sehingga keadilan dan keikutsertaan secara luas belum diterapkan.

Perwujudan keadilan keikutsertaan dapat diwujudkan dalam berbagai dimensi. Dalam bidang ekonomi, keadilan dapat diwujudkan dalam bentuk perbaikan, atau terjadinya proses afirmasi terhadap kelompok yang tertinggal, orang cacat, dan terpinggirkan. Dalam bidang sosial-politik, perwujudan keadilan keikutsertaan (inklusif) dapat berupa perbaikan akses semua kelompok terhadap kebebasan berpolitik, kesetaraan gender dalam politik dan penghapusan segala macam bentuk diskriminasi.

Upaya pengurangan kesenjangan pendapatan telah dilakukan oleh pemerintah dalam periode 2004-2009 dengan berbagai kebijakan. Misalnya, untuk mengurangi kesenjangan pendapatan, pemerintah melakukan realokasi subsidi yang diterima oleh kelompok yang berpenghasilan atas kepada masyarakat miskin melalui program-program yang bersifat langsung dan *targeted*. Realokasi subsidi BBM kepada program pendidikan dan kesehatan pada periode 2005-2008 juga merupakan bukti nyata dari upaya tersebut. Langkah konkret lain adalah pelaksanaan 3 gugus (*cluster*) program penanggulangan kemiskinan secara intensif dan koordinatif.

Proses perencanaan yang bersifat *bottom up* dan inklusif telah dipraktekkan dalam beberapa program, misalnya PNPM. Masyarakat dilibatkan sejak proses perencanaan, pemilihan proyek hingga evaluasi. Di sini pelibatan masyarakat dalam proses pembangunan menjadi komponen yang amat penting. Dengan pola ini masyarakat akan merasa lebih memiliki dan secara sukarela akan menjalankannya dan sekaligus mendapatkan manfaat dari program tersebut.

Dalam lima tahun ke depan, penguatan dimensi keadilan dan keikutsertaan akan dilakukan untuk setiap kegiatan atau program pembangunan. Misalnya melalui Program Keluarga Harapan (PKH), bagi masyarakat sangat miskin akan diberikan bantuan tunai bersyarat dalam bentuk dukungan biaya pendidikan dan kesehatan. Langkah ini diharapkan dalam jangka pendek akan memberikan penghasilan tambahan bagi keluarga tersebut (memperbaiki distribusi pendapatan) dan dalam jangka panjang akan dihasilkan generasi baru yang lebih baik tingkat pendidikan dan kesehatannya. Di samping itu, pemerintah akan mempertajam kualitas program perlindungan dan bantuan sosial dalam gugus (*cluster*) 1 untuk menjadi bantuan sosial berbasis keluarga.

Program lain yang akan dilanjutkan untuk memperbaiki distribusi pendapatan adalah program aksi perkuatan usaha mikro, kecil, dan menengah. Perluasan cakupan program PNPM meliputi seluruh kecamatan per tahun 2009 diharapkan meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan di tingkat perdesaaan dan kecamatan. Diharapkan modal sosial masyarakat ini meningkatkan mutu proses perencanaan *bottom-up* yang akan menjalar pada tingkat kabupaten dan propinsi dan seterusnya pada periode berikutnya.



4.1.4 Sasaran Pembangunan

Persoalan dan dimensi pembangunan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia selalu berubah dan makin kompleks. Permasalahan dan tuntutan pembangunan yang dihadapi akan bertambah banyak, sedangkan kemampuan dan sumber daya pembangunan yang tersedia cenderung terbatas. Pemerintah harus mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang tersedia untuk memenuhi tuntutan yang tidak terbatas dengan membuat pilihan dalam bentuk skala prioritas. Dalam menentukan pilihan tersebut, pemerintah bersikap realistis, dengan tidak membuat sasaran-sasaran yang sejak semula disadari tidak bisa dipenuhi.

Pengalaman selama periode 2004-2009 menjadi modal utama dalam menyusun agenda dan strategi pembangunan ini. Sejumlah indikator digunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan. Banyak faktor yang bersifat eksogen (di luar kendali pemerintah) akan mempengaruhi capaian tersebut. Faktor eksogen, dapat mempermudah pencapaian atau sebaliknya ia dapat pula menyebabkan sasaran yang ingin dicapai tidak terpenuhi atau hanya terpenuhi sebagian. Misalnya, kenaikan harga komoditas energi dapat mempunyai dampak positif terhadap pencapaian sasaran pertumbuhan ekonomi mengingat Indonesia masih tergolong sebagai negara produsen dan pengekspor energi neto. Sebaliknya, bencana alam seperti gelombang panas El Nino seperti yang terjadi sebelum krisis ekonomi tahun 1997 dapat menghambat upaya peningkatan produksi pangan dan berperan terhadap kenaikan tingkat kemiskinan pada saat itu. Meskipun kemungkinan terjadinya faktor eksogen tersebut tidak dapat diperkirakan dengan pasti, beberapa perubahan dapat dimitigasi dan diubah ke arah yang menguntungkan dengan kebijakan yang tepat.

Sasaran Pembangunan Ekonomi dan Kesejahteraan

Sesuai dengan persoalan utama yang dihadapi oleh bangsa Indonesia, pemerintah bertekad untuk melanjutkan proses percepatan pembangunan ekonomi selama lima tahun ke depan. Dengan pulihnya perekonomian global dalam 1-2 tahun mendatang, capaian tertinggi yang pernah dicapai oleh laju pertumbuhan perekonomian Indonesia sebelum krisis sekitar 7 persen sudah dapat dipenuhi sebelum tahun terakhir masa 2010-2014.

Percepatan laju pertumbuhan ekonomi ini diharapkan mampu menurunkan tingkat pengangguran terbuka hingga di sekitar 5-6 persen pada akhir tahun 2014, dan kesempatan kerja yang tercipta antara 9,6 juta-10,7 juta pekerja selama periode 2010-2014. Kombinasi antara percepatan pertumbuhan ekonomi dan berbagai kebijakan intervensi pemerintah yang terarah diharapkan dapat mempercepat penurunan tingkat kemiskinan menjadi sekitar 8-10 persen pada akhir 2014.

Untuk memenuhi sasaran percepatan pertumbuhan ekonomi tersebut, pemerintah akan terus melanjutkan kebijakan makroekonomi yang terukur dan berhati-

hati, sehingga inflasi dapat dikendalikan pada tingkat rendah yang sebanding dengan negara-negara setaraf dengan Indonesia yaitu sekitar 4-6 persen per tahun. Inflasi yang terkendali memungkinkan nilai tukar dan suku bunga yang kompetitif sehingga mendorong sektor riil bergerak dan berkembang dengan sehat.

Dalam bidang pendidikan, sasaran pembangunan ditujukan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan dan meningkatnya mutu pendidikan, yang antara lain ditandai oleh menurunnya jumlah penduduk buta huruf; meningkatnya secara nyata persentase penduduk yang dapat menyelesaikan program wajib belajar 9 tahun dan pendidikan lanjutan dan berkembangnya pendidikan kejuruan yang ditandai oleh meningkatnya jumlah tenaga terampil.

Sementara itu, di bidang kesehatan peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan, antara lain, ditandai oleh meningkatnya angka harapan hidup, menurunnya tingkat kematian bayi, dan kematian ibu melahirkan.

Dalam bidang pangan, terciptanya kemandirian dalam bidang pangan pada akhir tahun 2014 ditandai dengan meningkatnya ketahanan pangan rakyat, berupa perbaikan status gizi ibu dan anak pada golongan masyarakat yang rawan pangan, membaiknya akses rumah tangga golongan miskin terhadap pangan, terpelihara dan terus meningkatnya kemampuan swasembada beras dan komoditas pangan utama lainnya, menjaga harga pangan yang terjangkau bagi masyarakat kelompok pendapatan menengah bawah, menjaga nilai tukar petani agar dapat menikmati kemakmuran, dan meningkatkan daya tawar komoditas Indonesia dan keunggulan komparatif (*comparative advantage*) dari sektor pertanian Indonesia di kawasan regional Asia dan Global.

Bidang energi membangun ketahanan energi dengan mencapai diversifikasi energi yang menjamin keberlangsungan dan jumlah pasokan energi di seluruh Indonesia dan untuk seluruh penduduk Indonesia dengan tingkat pendapatan yang berbeda-beda, meningkatkan penggunaan energi terbarukan (*renewable energy*) dan berpartisipasi aktif dan memanfaatkan berkembangnya perdagangan karbon secara global, meningkatkan efisiensi konsumsi dan penghematan energi baik di lingkungan rumah tangga maupun industri dan sektor transportasi, dan memproduksi energi yang bersih dan ekonomis.

Dalam bidang lingkungan hidup, sasaran yang hendak dicapai adalah perbaikan mutu lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya alam di perkotaan dan pedesaan, penahanan laju kerusakan lingkungan dengan peningkatan daya dukung dan daya tampung lingkungan; peningkatan kapasitas adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Selain itu terus dilakukan program reboisasi, penghutanan kembali (reforestasi) dan program pengurangan emisi karbon.

Dalam rangka mengatasi dampak pemanasan global untuk mencapai pembangunan berkelanjutan, Indonesia, pada tahun 2009, dalam pertemuan G 20 di Pittsburgh dan Konvensi Internasional tentang Perubahan Iklim di Copenhagen telah



berinisitaif memberikan komitmen mitigasi dampak perubahan iklim berupa penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) pada tahun 2020 sebesar 26% dari kondisi tanpa rencana aksi (*business as usual - BAU*) dengan usaha sendiri serta penurunan sebesar 41% dengan dukungan internasional. Upaya penurunan emisi GRK tersebut terutama difokuskan pada kegiatan-kegiatan kehutanan, lahan gambut, limbah dan energi yang didukung oleh langkah-langkah kebijakan di berbagai sektor dan kebijakan fiskal.

Bidang infrastruktur meneruskan pembangunan dan pasokan infrastruktur yang ditunjukkan oleh meningkatnya kuantitas dan kualitas berbagai prasarana penunjang pembangunan seperti jalan raya, jalan kereta api, pelabuhan laut, pelabuhan udara, listrik, irigasi, air bersih dan sanitasi serta pos dan telekomunikasi.

Dalam bidang Usaha Kecil dan Menengah langkah-langkah yang dilakukan adalah, meningkatkan dan memajukan usaha kecil menengah dengan menambah akses terhadap modal termasuk perluasan Kredit Usaha Rakyat (KUR), meningkatkan bantuan teknis dalam aspek pengembangan produk dan pemasaran, melaksanakan kebijakan pemihakan untuk memberikan ruang usaha bagi pengusaha kecil dan menengah, serta menjaga fungsi, keberadaan serta efisiensi pasar tradisional.

Sasaran Perkuatan Pembangunan Demokrasi

Sasaran penegakan pilar demokrasi adalah membangun dan semakin memantapkan sistem demokrasi di Indonesia yang dapat menghasilkan pemerintahan dan lembaga legislatif yang kredibel, bermutu, efektif, dan mampu menyelenggarakan amanah dan tugas serta tanggung jawabnya secara baik, seimbang dengan peningkatan kepatuhan terhadap pranata hukum. Dengan demikian, fungsi *checks and balances* dapat dilakukan secara santun, beretika, dan efektif sehingga penyelenggaraan negara tidak terhambat oleh mekanisme dan sistem demokrasi, namun sebaliknya akan makin meningkat kualitas hasil dan akuntabilitasnya. Sasaran di bidang ini juga adalah untuk menjamin setiap lima tahun terselenggaranya proses pemilu yang memenuhi azas-azas demokrasi yang baik, yaitu jujur, adil, dan menjamin seluruh warga negara pemilih dapat melaksanakan hak memilihnya secara bebas dan bertanggung jawab.

Sasaran Penegakan Hukum

Penegakan Hukum merupakan elemen yang tidak dapat dipisahkan dan sangat penting dalam menjaga sistem demokrasi yang berkualitas dan juga mendukung iklim berusaha yang baik agar kegiatan ekonomi dapat berjalan dengan pasti, aman dan efisien, dalam rangka mencapai kesejahteraan rakyat.

Sasaran reformasi penegakan hukum adalah tercapainya suasana dan kepastian keadilan melalui penegakan hukum (*rule of law*) dan terjaganya ketertiban umum.

Sasaran tersebut tercermin dari persepsi masyarakat pencari keadilan untuk merasakan kenyamanan, kepastian, keadilan dan keamanan dalam berinteraksi dan mendapat pelayanan dari para penegak hukum (kepolisian dan kejaksaan). Dengan demikian, reformasi kepolisian dan kejaksaan, dan lembaga peradilan harus dilakukan untuk dapat menghasilkan sasaran berupa muncul dan tumbuhnya kepercayaan dan penghormatan publik kepada aparat dan lembaga penegak hukum karena mereka dipercaya akan selalu melindungi masyarakat berdasarkan azas keadilan dan kepatuhan pada aturan dan hukum tanpa pembedaan dan diskriminasi.

Selain berbagai bidang yang telah disebutkan di atas, pemerintah tetap mengembangkan sektor-sektor pembangunan lainnya secara konsisten, terkoordinasi dan terintegrasi. Dengan demikian, pada akhir RPJMN 2010 -2014 Indonesia berhasil mencapai berbagai sasaran pembangunan nasional untuk mewujudkan Indonesia yang sejahtera, demokratis, dan berkeadilan.

TABEL 1
SASARAN UTAMA PEMBANGUNAN NASIONAL
RPJMN 2010-2014

No.	PEMBANGUNAN	SASARAN	
I. SASARAN PEMBANGUNAN KESEJAHTERAAN RAKYAT			
1. Ekonomi			
a)	Pertumbuhan Ekonomi	Rata-rata 6,3 – 6,8 persen pertahun Sebelum tahun 2014 tumbuh 7%	
b)	Inflasi	Rata-rata 4 - 6 persen pertahun	
c)	Tingkat Pengangguran (terbuka)	5 - 6 persen pada akhir tahun 2014	
d)	Tingkat Kemiskinan	8 - 10 persen pada akhir tahun 2014	
2. Pendidikan			
		Status Awal (tahun 2008)	Target tahun 2014
a)	Meningkatnya rata-rata lama sekolah penduduk berusia 15 tahun ke atas (tahun)	7,50	8,25
b)	Menurunnya angka buta aksara penduduk berusia 15 tahun ke atas (persen)	5,97	4,18
c)	Meningkatnya APM SD/SDLB/	95,14	96,0



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

No.	PEMBANGUNAN	SASARAN	
	MI/Paket A (persen)		
d)	Meningkatnya APM SMP/SMPLB/MTs/Paket B (persen)	72,28	76,0
e)	Meningkatnya APK SMA/SMK/MA/Paket C (persen)	64,28	85,0
f)	Meningkatnya APK PT usia 19-23 tahun (persen)	21,26	30,0
g)	Menurunnya disparitas partisipasi dan kualitas pelayanan pendidikan antarwilayah, gender, dan sosial ekonomi, serta antarsatuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah dan masyarakat		
3. Kesehatan			
		Status Awal (tahun 2008)	Target tahun 2014
a)	Meningkatnya umur harapan hidup (tahun)	70,7	72,0
b)	Menurunnya angka kematian ibu melahirkan per 100.000 kelahiran hidup	228	118
c)	Menurunnya angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup	34	24
d)	Menurunnya prevalensi kekurangan gizi(gizi kurang dan gizi buruk) pada anak balita (persen)	18,4	< 15,0
4. Pangan			
a)	Produksi Padi	Tumbuh 3,22 persen per tahun	
b)	Produksi Jagung	Tumbuh 10,02 persen per tahun	
c)	Produksi Kedelai	Tumbuh 20,05 persen per tahun	
d)	Produksi Gula	Tumbuh 12,55 persen per tahun	
e)	Produksi Daging Sapi	Tumbuh 7,30 persen per tahun	
5. Energi			
a)	Peningkatan kapasitas pembangkit listrik	3.000 MW pertahun	
b)	Meningkatnya rasio elektrifikasi	Pada tahun 2014 mencapai 80 persen	
c)	Meningkatnya produksi minyak bumi	Pada tahun 2014 mencapai 1,01 juta barrel perhari	
d)	Peningkatan pemanfaatan energi panas bumi	Pada tahun 2014 mencapai 5.000 MW	

No.	PEMBANGUNAN	SASARAN
6. Infrastruktur		
a)	Pembangunan Jalan Lintas Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Papua	Hingga tahun 2014 mencapai sepanjang 19.370 km
b)	Pembangunan jaringan prasarana dan penyediaan sarana transportasi antar-moda dan antar-pulau yang terintegrasi sesuai dengan Sistem Transportasi Nasional dan Cetak Biru Transportasi Multimoda	Selesai tahun 2014
c)	Penuntasan pembangunan Jaringan Serat Optik di Indonesia Bagian Timur	Selesai sebelum tahun 2013
d)	Perbaikan sistem dan jaringan transportasi di 4 kota besar (Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Medan)	Selesai tahun 2014
II. SASARAN PERKUATAN PEMBANGUNAN DEMOKRASI		
1.	Meningkatnya kualitas demokrasi Indonesia	<ol style="list-style-type: none"> 1) Semakin terjaminnya peningkatan iklim politik kondusif bagi berkembangnya kualitas kebebasan sipil dan hak-hak politik rakyat yang semakin seimbang dengan peningkatan kepatuhan terhadap pranata hukum; 2) Meningkatnya kinerja lembaga-lembaga demokrasi, dengan indeks rata-rata 70 pada akhir tahun 2014; 3) Menyelenggarakan pemilu tahun 2014 yang dapat dilaksanakan dengan adil dan demokratis, dengan tingkat partisipasi politik rakyat 75% dan berkurangnya diskriminasi hak dipilih dan memilih; 4) Meningkatnya layanan informasi dan komunikasi <p>Pada tahun 2014:</p> <ul style="list-style-type: none"> ► Indeks Demokrasi Indonesia: 73

No.	PEMBANGUNAN	SASARAN
III. SASARAN PEMBANGUNAN PENEGAKAN HUKUM		
1	Tercapainya suasana dan kepastian keadilan melalui penegakan hukum (<i>rule of law</i>) dan terjaganya ketertiban umum.	1) Persepsi masyarakat pencari keadilan untuk merasakan kenyamanan, kepastian, keadilan dan keamanan dalam berinteraksi dan mendapat pelayanan dari para penegak hukum 2) Tumbuhnya kepercayaan dan penghormatan publik kepada aparat dan lembaga penegak hukum 3) Mendukung iklim berusaha yang baik sehingga kegiatan ekonomi dapat berjalan dengan pasti dan aman serta efisien Indeks Persepsi Korupsi (IPK) tahun 2014 sebesar 5,0 yang meningkat dari 2,8 pada tahun 2009

4.2 Arah Kebijakan Umum Pembangunan Nasional

4.2.1 Arah Kebijakan Umum

Mengacu pada permasalahan dan tantangan yang dihadapi bangsa dan negara Indonesia baik dewasa ini maupun dalam lima tahun mendatang, maka arah kebijakan umum pembangunan nasional 2010-2014 adalah sebagai berikut:

1. Arah kebijakan umum untuk melanjutkan pembangunan mencapai Indonesia yang sejahtera. Indonesia yang sejahtera tercermin dari peningkatan tingkat kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan dalam bentuk percepatan pertumbuhan ekonomi yang didukung oleh penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengurangan kemiskinan, pengurangan tingkat pengangguran yang diwujudkan dengan bertumpu pada program perbaikan kualitas sumber daya manusia, perbaikan infrastruktur dasar, serta terjaganya dan terpeliharanya lingkungan hidup secara berkelanjutan.
2. Arah kebijakan umum untuk memperkuat pilar-pilar demokrasi dengan penguatan yang bersifat kelembagaan dan mengarah pada tegaknya ketertiban umum, penghapusan segala macam diskriminasi, pengakuan dan penerapan hak asasi manusia serta kebebasan yang bertanggung jawab.

3. Arah kebijakan umum untuk memperkuat dimensi keadilan dalam semua bidang termasuk pengurangan kesenjangan pendapatan, pengurangan kesenjangan pembangunan antar daerah (termasuk desa-kota), dan kesenjangan gender. Keadilan juga hanya dapat diwujudkan bila sistem hukum berfungsi secara kredibel, bersih, adil dan tidak pandang bulu. Demikian pula kebijakan pemberantasan korupsi secara konsisten diperlukan agar tercapai rasa keadilan dan pemerintahan yang bersih.

Berdasarkan keberhasilan pencapaian program pembangunan dalam lima tahun sebelumnya (2004-2009), pemerintah akan melanjutkan pendekatan pembangunan kelembagaan dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan. Pendekatan yang bersifat kelembagaan ini dimaksudkan sebagai pendekatan yang menyeimbangkan antara pentingnya proses yang berlandaskan pada tatakelola yang baik, bersih, transparan, adil, dan akuntabel, dengan hasil yang baik dan efisien. Pemerintahan tidak seharusnya hanya berorientasi pada hasil jangka pendek, dengan tidak mengindahkan azas-azas kepatutan, keadilan, dan keberlanjutan. Pendekatan ini dipandang akan memberikan hasil yang berkelanjutan karena dibangun di atas fondasi yang lebih kokoh, melewati proses yang telah disetujui bersama secara demokratis, serta dengan rasa memiliki yang tinggi dan akuntabel.

Pembangunan kelembagaan ini tidak hanya membangun mekanisme kelembagaan yang baru, tetapi juga mengembalikan kembali aturan lama yang dipandang lebih berkelanjutan ke dalam sistem. Sebagai contoh, program BOS selama ini lebih banyak dilakukan pemerintah pusat, padahal UU Otonomi Daerah menetapkan bahwa pendidikan merupakan tugas pemerintah kabupaten/kota, selanjutnya program ini akan lebih mengedepankan dan mengaktifkan peran pemerintah daerah.

4.2.2 Prioritas Nasional

Visi dan Misi pemerintah 2009-2014, perlu dirumuskan dan dijabarkan lebih operasional ke dalam sejumlah program prioritas sehingga lebih mudah diimplementasikan dan diukur tingkat keberhasilannya. Sebelas Prioritas Nasional di bawah ini bertujuan untuk sejumlah tantangan yang dihadapi oleh bangsa dan negara di masa mendatang.

Sebagian besar sumber daya dan kebijakan akan diprioritaskan untuk menjamin implementasi dari 11 prioritas nasional yaitu: (1) reformasi birokrasi dan tata kelola; (2) pendidikan; (3) kesehatan; (4) penanggulangan kemiskinan; (5) ketahanan pangan; (6) infrastruktur; (7) iklim investasi dan usaha; (8) energi; (9) lingkungan hidup dan bencana; (10) daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan paskakonflik; serta (11) kebudayaan, kreativitas, dan inovasi teknologi.

Prioritas 1: Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Pemantapan tata kelola pemerintahan yang lebih baik melalui terobosan kinerja secara terpadu, penuh integritas, akuntabel, taat kepada hukum yang berwibawa, dan transparan. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang ditopang oleh efisiensi struktur pemerintah di pusat dan di daerah, kapasitas pegawai pemerintah yang memadai, dan data kependudukan yang baik.

Oleh karena itu, substansi inti dari reformasi birokrasi dan tata kelola adalah sebagai berikut :

1. Struktur: Konsolidasi struktural dan peningkatan kapasitas kementerian/lembaga yang menangani aparatur negara yaitu Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN), Badan Kepegawaian Negara (BKN), dan Lembaga Administrasi Negara (LAN) pada 2010; restrukturisasi lembaga pemerintah lainnya, seperti di bidang keberdayaan UMKM, pengelolaan energi, pemanfaatan sumber daya kelautan, restrukturisasi BUMN, hingga pemanfaatan tanah dan penataan ruang bagi kepentingan rakyat banyak selambat-lambatnya 2014;
2. Otonomi daerah: Penataan otonomi daerah melalui 1) penghentian/pembatasan pemekaran wilayah; 2) peningkatan efisiensi dan efektivitas penggunaan dana perimbangan daerah; dan 3) penyempurnaan pelaksanaan pemilihan kepala daerah;
3. Sumber daya manusia: penyempurnaan pengelolaan PNS yang meliputi sistem rekrutmen, pendidikan, penempatan, promosi, dan mutasi PNS secara terpusat selambat-lambatnya 2011;
4. Regulasi: Percepatan harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan di tingkat pusat dan daerah hingga tercapai keselarasan arah dalam implementasi pembangunan, di antaranya penyelesaian kajian 12.000 peraturan daerah selambat-lambatnya 2011;
5. Sinergi antara pusat dan daerah: Penetapan dan penerapan sistem Indikator Kinerja Utama Pelayanan Publik yang selaras antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah;
6. Penegakan Hukum: Peningkatan integrasi dan integritas penerapan dan penegakan hukum oleh seluruh lembaga dan aparat hukum
7. Data Kependudukan: Penetapan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan pengembangan Sistem Informasi dan Administrasi Kependudukan (SIAK) dengan aplikasi pertama pada kartu tanda penduduk selambat-lambatnya pada 2011.

Prioritas 2: Pendidikan

Peningkatan akses pendidikan yang berkualitas, terjangkau, relevan, dan efisien menuju terangkatnya kesejahteraan hidup rakyat, kemandirian, keluhuran budi pekerti, dan karakter bangsa yang kuat. Pembangunan bidang pendidikan diarahkan demi tercapainya pertumbuhan ekonomi yang didukung keselarasan antara ketersediaan tenaga terdidik dengan kemampuan: 1) menciptakan lapangan kerja atau kewirausahaan dan 2) menjawab tantangan kebutuhan tenaga kerja.

Oleh karena itu, substansi inti program aksi bidang pendidikan adalah sebagai berikut:

1. Akses pendidikan dasar-menengah: Peningkatan Angka Partisipasi Murni (APM) pendidikan dasar dari 95% di 2009 menjadi 96% di 2014 dan APM pendidikan setingkat SMP dari 73% menjadi 76% dan Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan setingkat SMA dari 69% menjadi 85%; Pemantapan/rasionalisasi implementasi BOS, penurunan harga buku standar di tingkat sekolah dasar dan menengah sebesar 30-50% selambat-lambatnya 2012 dan penyediaan sambungan internet ber-content pendidikan ke sekolah tingkat menengah selambat-lambatnya 2012 dan terus diperluas ke tingkat sekolah dasar;
2. Akses pendidikan tinggi: Peningkatan APK pendidikan tinggi dari 18% di 2009 menjadi 25% di 2014;
3. Metodologi: Penerapan metodologi pendidikan yang tidak lagi berupa pengajaran demi kelulusan ujian (*teaching to the test*), namun pendidikan menyeluruh yang memperhatikan kemampuan sosial, watak, budi pekerti, kecintaan terhadap budaya-bahasa Indonesia melalui penyesuaian sistem Ujian Akhir Nasional pada 2011 dan penyempurnaan kurikulum sekolah dasar-menengah sebelum tahun 2011 yang diterapkan di 25% sekolah pada 2012 dan 100% pada 2014;
4. Pengelolaan: Pemberdayaan peran kepala sekolah sebagai manajer sistem pendidikan yang unggul, revitalisasi peran pengawas sekolah sebagai entitas *quality assurance*, mendorong aktivasi peran Komite Sekolah untuk menjamin keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses pembelajaran, dan Dewan Pendidikan di tingkat Kabupaten;
5. Kurikulum: Penataan ulang kurikulum sekolah yang dibagi menjadi kurikulum tingkat nasional, daerah, dan sekolah sehingga dapat mendorong penciptaan hasil didik yang mampu menjawab kebutuhan SDM untuk mendukung pertumbuhan nasional dan daerah dengan memasukkan pendidikan kewirausahaan (diantaranya dengan mengembangkan model *link and match*);

6. Kualitas: Peningkatan kualitas guru, pengelolaan dan layanan sekolah, melalui: 1) program remediasi kemampuan mengajar guru; 2) penerapan sistem evaluasi kinerja profesional tenaga pengajar; 3) sertifikasi ISO 9001:2008 di 100% PTN, 50% PTS, 100% SMK sebelum 2014; 4) membuka luas kerja sama PTN dengan lembaga pendidikan internasional; 5) mendorong 11 PT masuk Top 500 THES pada 2014; 6) memastikan perbandingan guru:murid di setiap SD & MI sebesar 1:32 dan di setiap SMP & MTs 1:40; dan 7) memastikan tercapainya Standar Nasional Pendidikan (SNP) bagi Pendidikan Agama dan Keagamaan paling lambat tahun 2013.

Prioritas 3: Kesehatan

Penitikberatan pembangunan bidang kesehatan melalui pendekatan preventif, tidak hanya kuratif, melalui peningkatan kesehatan masyarakat dan lingkungan di antaranya dengan perluasan penyediaan air bersih, pengurangan wilayah kumuh sehingga secara keseluruhan dapat meningkatkan angka harapan hidup dari 70,7 tahun pada 2009 menjadi 72,0 tahun pada 2014, dan pencapaian keseluruhan sasaran Millenium Development Goals (MDGs) tahun 2015.

Oleh karena itu, substansi inti program aksi bidang kesehatan adalah sebagai berikut:

1. Program kesehatan masyarakat: Pelaksanaan Program Kesehatan Preventif Terpadu yang meliputi pemberian imunisasi dasar kepada 90% balita pada 2014; Penyediaan akses sumber air bersih yang menjangkau 67% penduduk dan akses terhadap sanitasi dasar berkualitas yang menjangkau 75% penduduk sebelum 2014; Penurunan tingkat kematian ibu saat melahirkan dari 307 per 100.000 kelahiran pada 2008 menjadi 118 pada 2014, serta tingkat kematian bayi dari 34 per 1.000 kelahiran pada 2008 menjadi 24 pada 2014;
2. Program KB: Peningkatan kualitas dan jangkauan layanan KB melalui 23.500 klinik pemerintah dan swasta selama 2010-2014;
3. Sarana kesehatan: Ketersediaan dan peningkatan kualitas layanan rumah sakit berakreditasi internasional di minimal 5 kota besar di Indonesia dengan target 3 kota pada 2012 dan 5 kota pada 2014;
4. Obat: Pemberlakuan Daftar Obat Esensial Nasional sebagai dasar pengadaan obat di seluruh Indonesia dan pembatasan harga obat generik bermerek pada 2010;
5. Asuransi Kesehatan Nasional: Penerapan Asuransi Kesehatan Nasional untuk seluruh keluarga miskin dengan cakupan 100% pada 2011 dan diperluas secara bertahap untuk keluarga Indonesia lainnya antara 2012-2014.

Prioritas 4: Penanggulangan Kemiskinan

Penurunan tingkat kemiskinan absolut dari 14,1% pada 2009 menjadi 8-10% pada 2014 dan perbaikan distribusi pendapatan dengan perlindungan sosial yang berbasis keluarga, pemberdayaan masyarakat dan perluasan kesempatan ekonomi masyarakat yang berpendapatan rendah.

Oleh karena itu, substansi inti program aksi penanggulangan kemiskinan adalah sebagai berikut:

1. Bantuan Sosial Terpadu: Integrasi program perlindungan sosial berbasis keluarga yang mencakup program Bantuan Langsung Tunai (BLT) baik yang bersifat insidensial atau kepada kelompok marginal, bantuan pangan, jaminan sosial bidang kesehatan, beasiswa bagi anak keluarga berpendapatan rendah, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), dan Parenting Education mulai 2010 dan program keluarga harapan diperluas menjadi program nasional mulai 2011—2012;
2. PNPM Mandiri: Penambahan anggaran PNPM Mandiri dari Rp 10,3 triliun pada 2009 menjadi Rp 12,1 triliun pada 2010, pemenuhan Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Rp 3 miliar per kecamatan untuk minimal 30% kecamatan termiskin di pedesaan, dan integrasi secara selektif PNPM Pendukung;
3. Kredit Usaha Rakyat (KUR): Pelaksanaan penyempurnaan mekanisme penyaluran KUR mulai 2010 dan perluasan cakupan KUR mulai 2011;
4. Tim Penanggulangan Kemiskinan: Revitalisasi Komite Nasional Penanggulangan Kemiskinan di bawah koordinasi Wakil Presiden, penggunaan unified database untuk penetapan sasaran program mulai 2009-2010, dan penerapan sistem monitoring dan evaluasi yang akurat sebagai dasar keputusan dan alokasi anggaran.

Prioritas 5: Ketahanan Pangan

Peningkatan ketahanan pangan dan lanjutan revitalisasi pertanian untuk mewujudkan kemandirian pangan, peningkatan daya saing produk pertanian, peningkatan pendapatan petani, serta kelestarian lingkungan dan sumber daya alam. Peningkatan pertumbuhan PDB sektor pertanian sebesar 3,7% per tahun dan Indeks Nilai Tukar Petani sebesar 115-120 pada 2014.

Oleh karena itu, substansi inti program aksi ketahanan pangan adalah sebagai berikut:



1. Lahan, Pengembangan Kawasan dan Tata Ruang Pertanian: Penataan regulasi untuk menjamin kepastian hukum atas lahan pertanian, pengembangan areal pertanian baru seluas 2 juta hektar, penertiban serta optimalisasi penggunaan lahan terlantar;
2. Infrastruktur: Pembangunan dan pemeliharaan sarana transportasi dan angkutan, pengairan, jaringan listrik, serta teknologi komunikasi dan sistem informasi nasional yang melayani daerah-daerah sentra produksi pertanian demi peningkatan kuantitas dan kualitas produksi serta kemampuan pemasarannya;
3. Penelitian dan Pengembangan: Peningkatan upaya penelitian dan pengembangan bidang pertanian yang mampu menciptakan benih unggul dan hasil penelitian lainnya menuju kualitas dan produktivitas hasil pertanian nasional yang tinggi;
4. Investasi, Pembiayaan, dan Subsidi: Dorongan untuk investasi pangan, pertanian, dan industri perdesaan berbasis produk lokal oleh pelaku usaha dan pemerintah, penyediaan pembiayaan yang terjangkau, serta sistem subsidi yang menjamin ketersediaan benih varietas unggul yang teruji, pupuk, teknologi dan sarana pasca panen yang sesuai secara tepat waktu, tepat jumlah, dan terjangkau;
5. Pangan dan Gizi: Peningkatan kualitas gizi dan keanekaragaman pangan melalui peningkatan pola pangan harapan;
6. Adaptasi Perubahan Iklim: Pengambilan langkah-langkah kongkrit terkait adaptasi dan antisipasi sistem pangan dan pertanian terhadap perubahan iklim.

Prioritas 6: Infrastruktur

Pembangunan infrastruktur nasional yang memiliki daya dukung dan daya gerak terhadap pertumbuhan ekonomi dan sosial yang berkeadilan dan mengutamakan kepentingan masyarakat umum di seluruh bagian negara kepulauan Republik Indonesia dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Oleh karena itu, substansi inti program aksi bidang infrastruktur adalah sebagai berikut:

1. Tanah dan tata ruang: Konsolidasi kebijakan penanganan dan pemanfaatan tanah untuk kepentingan umum secara menyeluruh di bawah satu atap dan pengelolaan tata ruang secara terpadu;
2. Jalan: Penyelesaian pembangunan Lintas Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Papua sepanjang total 19.370 km pada 2014;

3. Perhubungan: Pembangunan jaringan prasarana dan penyediaan sarana transportasi antarmoda dan antarpulau yang terintegrasi sesuai dengan Sistem Transportasi Nasional dan Cetak Biru Transportasi Multimoda dan penurunan tingkat kecelakaan transportasi sehingga pada 2014 lebih kecil dari 50% keadaan saat ini;
4. Perumahan rakyat: Pembangunan 685.000 Rumah Sederhana Sehat Bersubsidi, 180 Rusunami dan 650 *twin block* berikut fasilitas pendukung kawasan permukiman yang dapat menampung 836.000 keluarga yang kurang mampu pada 2012;
5. Pengendalian banjir: Penyelesaian pembangunan prasarana pengendalian banjir, diantaranya Banjir Kanal Timur Jakarta sebelum 2012 dan penanganan secara terpadu Daerah Aliran Sungai Bengawan Solo sebelum 2013;
6. Telekomunikasi: Penuntasan pembangunan jaringan serat optik di Indonesia bagian timur sebelum 2013 dan maksimalisasi tersedianya akses komunikasi data dan suara bagi seluruh rakyat;
7. Transportasi perkotaan: Perbaikan sistem dan jaringan transportasi di 4 kota besar (Jakarta, Bandung, Surabaya, Medan) sesuai dengan Cetak Biru Transportasi Perkotaan, termasuk penyelesaian pembangunan angkutan kereta listrik di Jakarta (MRT dan Monorail) selambat-lambatnya 2014.

Prioritas 7: Iklim Investasi dan Iklim Usaha

Peningkatan investasi melalui perbaikan kepastian hukum, penyederhanaan prosedur, perbaikan sistem informasi, dan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

Oleh karena itu, substansi inti program aksi bidang iklim investasi dan iklim usaha adalah sebagai berikut:

1. Kepastian hukum: Reformasi regulasi secara bertahap di tingkat nasional dan daerah sehingga terjadi harmonisasi peraturan perundang-undangan yang tidak menimbulkan ketidakjelasan dan inkonsistensi dalam implementasinya;
2. Penyederhanaan prosedur: Penerapan sistem pelayanan informasi dan perizinan investasi secara elektronik (SPSIE) pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di beberapa kota yang dimulai di Batam, pembatalan perda bermasalah dan pengurangan biaya untuk memulai usaha seperti Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP);



3. Logistik nasional: Pengembangan dan penetapan Sistem Logistik Nasional yang menjamin kelancaran arus barang dan mengurangi biaya transaksi/ekonomi biaya tinggi;
4. Sistem informasi: Beroperasinya secara penuh *National Single Window* (NSW) untuk impor (sebelum Januari 2010) dan ekspor. Percepatan realisasi proses penyelesaian bea cukai di luar pelabuhan dengan implementasi tahap pertama *Custom Advanced Trade System* (CATS) di *dry port* Cikarang;
5. KEK: Pengembangan KEK di 5 (lima) lokasi melalui skema Public-Private Partnership sebelum 2012;
6. Kebijakan ketenagakerjaan: Sinkronisasi kebijakan ketenagakerjaan dan iklim usaha dalam rangka memperluas penciptaan lapangan kerja.

Prioritas 8: Energi

Pencapaian ketahanan energi nasional yang menjamin kelangsungan pertumbuhan nasional melalui restrukturisasi kelembagaan dan optimalisasi pemanfaatan energi alternatif seluas-luasnya.

Oleh karena itu, substansi inti program aksi bidang energi adalah sebagai berikut:

1. Kebijakan: Pengambilan kewenangan atas kebijakan energi ke dalam Kantor Presiden untuk memastikan penanganan energi nasional yang terintegrasi sesuai dengan Rencana Induk Energi Nasional;
2. Restrukturisasi BUMN: Transformasi dan konsolidasi BUMN bidang energi dimulai dari PLN dan Pertamina yang selesai selambat-lambatnya 2010 dan diikuti oleh BUMN lainnya;
3. Kapasitas energi: Peningkatan kapasitas pembangkit listrik sebesar rata-rata 3.000 MW per tahun mulai 2010 dengan rasio elektrifikasi yang mencakup 62% pada 2010 dan 80% pada 2014; dan produksi minyak bumi sebesar lebih dari 1,01 juta barrel per hari mulai 2014;
4. Energi alternatif: Peningkatan pemanfaatan energi terbarukan termasuk energi alternatif *geothermal* sehingga mencapai 2.000 MW pada 2012 dan 5.000 MW pada 2014 dan dimulainya produksi *coal bed methane* untuk membangkitkan listrik pada 2011 disertai pemanfaatan potensi tenaga surya, *microhydro*, serta nuklir secara bertahap;

5. Hasil ikutan dan turunan minyak bumi/gas: Revitalisasi industri pengolah hasil ikutan/turunan minyak bumi dan gas sebagai bahan baku industri tekstil, pupuk dan industri hilir lainnya;
6. Konversi menuju penggunaan gas: Perluasan program konversi minyak tanah ke gas sehingga mencakup 42 juta Kepala Keluarga pada 2010; penggunaan gas alam sebagai bahan bakar angkutan umum perkotaan di Palembang, Surabaya, dan Denpasar.

Prioritas 9: Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana

Konservasi dan pemanfaatan lingkungan hidup mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan yang berkelanjutan, disertai penguasaan dan pengelolaan risiko bencana untuk mengantisipasi perubahan iklim.

Oleh karena itu, substansi inti program aksi bidang lingkungan hidup dan pengelolaan bencana adalah sebagai berikut:

1. Perubahan iklim: Peningkatan keberdayaan pengelolaan lahan gambut, peningkatan hasil rehabilitasi seluas 500,000 ha per tahun, dan penekanan laju deforestasi secara sungguh-sungguh di antaranya melalui kerja sama lintas kementerian terkait serta optimalisasi dan efisiensi sumber pendanaan seperti dana Iuran Hak Pemanfaatan Hutan (IHPH), Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH), dan Dana Reboisasi;
2. Pengendalian Kerusakan Lingkungan: Penurunan beban pencemaran lingkungan melalui pengawasan ketaatan pengendalian pencemaran air limbah dan emisi di 680 kegiatan industri dan jasa pada 2010 dan terus berlanjut; Penurunan jumlah *hotspot* kebakaran hutan sebesar 20% per tahun dan penurunan tingkat polusi keseluruhan sebesar 50% pada 2014; Penghentian kerusakan lingkungan di 11 Daerah Aliran Sungai yang rawan bencana mulai 2010 dan seterusnya;
3. Sistem Peringatan Dini: Penjaminan berjalannya fungsi Sistem Peringatan Dini Tsunami (TEWS) dan Sistem Peringatan Dini Cuaca (MEWS) mulai 2010 dan seterusnya, serta Sistem Peringatan Dini Iklim (CEWS) pada 2013;
4. Penanggulangan bencana: Peningkatan kemampuan penanggulangan bencana melalui: 1) penguatan kapasitas aparaturnya pemerintah dan masyarakat dalam usaha mitigasi risiko serta penanganan bencana dan bahaya kebakaran hutan di 33 propinsi, dan 2) pembentukan tim gerak cepat (unit khusus penanganan bencana) dengan dukungan peralatan dan alat transportasi yang memadai dengan basis di dua lokasi strategis (Jakarta dan Malang) yang dapat menjangkau seluruh wilayah Indonesia.



Prioritas 10: Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, dan Pasca-Konflik

Program aksi untuk daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan pascakonflik ditujukan untuk pengutamaan dan penjaminan pertumbuhan di daerah tertinggal, terdepan, terluar serta keberlangsungan kehidupan damai di wilayah pascakonflik dengan substansi inti sebagai berikut:

1. Kebijakan: Pelaksanaan kebijakan khusus dalam bidang infrastruktur dan pendukung kesejahteraan lainnya yang dapat mendorong pertumbuhan di daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan pascakonflik selambat-lambatnya dimulai pada 2011;
2. Kerjasama internasional: Pembentukan kerja sama dengan negara-negara tetangga dalam rangka pengamanan wilayah dan sumber daya kelautan;
3. Keutuhan wilayah: Penyelesaian pemetaan wilayah perbatasan RI dengan Malaysia, Papua Nugini, Timor Leste, dan Filipina pada 2010;
4. Daerah tertinggal: Pengentasan daerah tertinggal di sedikitnya 50 kabupaten paling lambat 2014.

Prioritas 11: Kebudayaan, Kreativitas, dan Inovasi Teknologi

Pengembangan dan perlindungan kebhinekaan budaya, karya seni, dan ilmu serta apresiasinya, untuk memperkaya khazanah artistik dan intelektual bagi tumbuh-mampunya jati diri dan kemampuan adaptif kompetitif bangsa yang disertai pengembangan inovasi, ilmu pengetahuan, dan teknologi yang dilandasi oleh keunggulan Indonesia sebagai negara maritim dan kepulauan.

Oleh karena itu, substansi inti program aksi bidang kebudayaan, kreativitas, dan inovasi teknologi adalah sebagai berikut:

1. Perawatan: Penetapan dan pembentukan pengelolaan terpadu untuk pengelolaan cagar budaya, revitalisasi museum dan perpustakaan di seluruh Indonesia ditargetkan sebelum Oktober 2011;
2. Sarana: Penyediaan sarana yang memadai bagi pengembangan, pendalaman dan pagelaran seni budaya di kota besar dan ibu kota kabupaten selambat-lambatnya Oktober 2012;
3. Penciptaan: Pengembangan kapasitas nasional untuk pelaksanaan penelitian, penciptaan dan inovasi dan memudahkan akses dan penggunaannya oleh masyarakat luas;

4. Kebijakan: Peningkatan perhatian dan kesertaan pemerintah dalam program-program seni budaya yang diinisiasi oleh masyarakat dan mendorong berkembangnya apresiasi terhadap kemajemukan budaya;
5. Inovasi teknologi: Peningkatan keunggulan komparatif menjadi keunggulan kompetitif yang mencakup pengelolaan sumber daya maritim menuju ketahanan energi, pangan, dan antisipasi perubahan iklim; dan pengembangan penguasaan teknologi dan kreativitas pemuda.

Pada dasarnya kesebelas Prioritas Nasional di atas merupakan upaya untuk :

Pertama, Percepatan Pembangunan Infrastruktur Fisik (meliputi Prioritas 5 Ketahanan Pangan, Prioritas 6 Infrastruktur, Prioritas 8 Energi, serta Prioritas 10 Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, dan Pasca-Konflik).

Kedua, Perbaikan Infrastruktur Lunak (Prioritas 1 Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola dan Prioritas 7 Iklim Investasi dan Iklim Usaha)

Ketiga, Penguatan Infrastruktur Sosial (Prioritas 2 Pendidikan, Prioritas 3 Kesehatan, Prioritas 4 Penanggulangan Kemiskinan dan Prioritas 9 Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana)

Keempat, Pembangunan Kreativitas (Prioritas 11 Kebudayaan, Kreativitas, dan Inovasi Teknologi).

Prioritas Lainnya

Di samping sebelas prioritas nasional tersebut di atas, upaya untuk mewujudkan Visi dan Misi Pembangunan Nasional juga melalui pencapaian prioritas nasional lainnya di bidang politik, hukum, dan keamanan, di bidang perekonomian, dan di bidang kesejahteraan rakyat.

Di bidang politik, hukum, dan keamanan mencakup: (a) pelaksanaan koordinasi terhadap mekanisme prosedur penanganan terorisme; (b) pelaksanaan program deradikalisasi untuk menangkal terorisme; (c) peningkatan peran Republik Indonesia dalam mewujudkan perdamaian dunia; (d) peningkatan pelayanan dan perlindungan tenaga kerja indonesia (TKI) di luar negeri; (e) penguatan dan pemantapan hubungan kelembagaan pencegahan dan pemberantasan korupsi; (f) pelaksanaan perlindungan saksi dan pelapor; (g) pengembalian aset (*asset recovery*); (h) peningkatan kepastian hukum; (i) penguatan perlindungan HAM; dan (i) pemberdayaan industri strategis pertahanan.

Di bidang perekonomian mencakup: (a) pelaksanaan pengembangan industri sesuai dengan Peraturan Presiden No.28/2008 tentang Kebijakan Industri Nasional; (b) peningkatan peran dan kemampuan Republik Indonesia dalam diplomasi perdagangan internasional; (c) peningkatan pelayanan dan perlindungan tenaga kerja indonesia



(TKI) selama proses penyiapan, pemberangkatan, dan kepulangan; serta (d) peningkatan upaya pelayanan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia (TKI) di luar negeri.

Di bidang kesejahteraan rakyat mencakup: (a) pelaksanaan ibadah haji yang tertib dan lancar paling lambat pada 2010; (b) peningkatan kerukunan umat beragama melalui pembentukan dan peningkatan efektivitas Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB); (c) peningkatan jumlah wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara sebesar 20% secara bertahap dalam 5 tahun; (d) promosi 10 tujuan pariwisata Indonesia melalui saluran pemasaran dan pengiklanan yang kreatif dan efektif; (e) perbaikan dan peningkatan kualitas jaringan prasarana dan sarana pendukung pariwisata; (f) peningkatan kapasitas pemerintah dan pemangku kepentingan pariwisata lokal untuk mencapai tingkat mutu pelayanan dan *hospitality management* yang kompetitif di kawasan Asia; (g) perumusan kebijakan dan pedoman bagi penerapan pengarusutamaan (*mainstreaming*) Gender dan Anak (PUG & A) oleh Kementerian Negara dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian lainnya; (h) pencapaian posisi papan atas pada *South East Asia (SEA) Games* pada tahun 2011, peningkatan perolehan medali di *Asian Games* tahun 2010 dan Olimpiade tahun 2012; (i) peningkatan *character building* melalui gerakan, revitalisasi dan konsolidasi gerakan kepemudaan; serta (j) revitalisasi gerakan pramuka.

4.3 Arah Kebijakan Bidang-Bidang Pembangunan

Pembangunan Nasional dilakukan secara menyeluruh di berbagai bidang kehidupan masyarakat. Untuk itu, perencanaan pembangunan nasional dikelompokkan ke dalam 9 (sembilan) bidang pembangunan menurut Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025, yaitu:

1. Bidang Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama
2. Bidang Ekonomi
3. Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
4. Bidang Sarana dan Prasarana
5. Bidang Politik
6. Bidang Pertahanan dan Keamanan
7. Bidang Hukum dan Aparatur
8. Bidang Wilayah dan Tataruang
9. Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Arah dan kebijakan masing-masing bidang pembangunan tersebut diuraikan dalam Buku II.

Sinergi antar bidang pembangunan sangat penting untuk kelancaran pelaksanaan dan tercapainya berbagai sasaran dalam RPJMN 2010-2014. Pada dasarnya pembangunan di setiap bidang untuk mencapai keberhasilan, tidak dapat

berdiri sendiri, tetapi saling terkait dengan pembangunan di bidang lainnya. Dengan pembiayaan yang terbatas, untuk mencapai efektifitas, efisiensi dan hasil yang maksimal dalam mencapai sasaran pembangunan, harus dilakukan sinkronisasi pembangunan di setiap bidang, sehingga kegiatan di setiap bidang saling terpadu, mendukung dan saling memperkuat.

Selanjutnya, di dalam melaksanakan pembangunan yang tertuang dalam RPJMN terdapat prinsip pengarusutamaan yang menjadi landasan operasional bagi seluruh pelaksanaan pembangunan. Prinsip-prinsip pengarusutamaan ini diarahkan untuk dapat tercermin di dalam keluaran pada kebijakan pembangunan, yang mencakup: (1) pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan; (2) pengarusutamaan tata kelola pemerintahan yang baik; dan (3) pengarusutamaan gender. Prinsip-prinsip pengarusutamaan ini akan menjadi jiwa dan semangat yang mewarnai berbagai kebijakan pembangunan di setiap bidang pembangunan. Dengan dijiwainya prinsip-prinsip pengarusutamaan ini, pembangunan jangka menengah ini akan memperkuat upaya mengatasi berbagai permasalahan yang ada.

RPJMN 2010-2014 ini juga diarahkan untuk menjadi sebuah rencana kerja jangka menengah yang bersifat menyeluruh. Persoalan yang bersifat lintas bidang harus ditangani secara holistik dan tidak terfragmentasi sehingga dapat menyelesaikan persoalan yang sebenarnya. Pencapaian kinerja pembangunan tersebut menjadi komitmen semua pihak khususnya instansi pemerintah untuk dapat merealisasikannya secara sungguh-sungguh untuk kepentingan rakyat dan bangsa Indonesia. Oleh karena itu disusun pula rencana kerja yang bersifat lintas bidang meliputi (1) penanggulangan kemiskinan ; (2) perubahan iklim global; (3) pembangunan kelautan berdimensi kepulauan, dan (4) perlindungan anak. Kebijakan lintas bidang ini akan menjadi sebuah rangkaian kebijakan antarbidang yang terpadu meliputi prioritas, fokus prioritas serta kegiatan prioritas lintas bidang untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan yang semakin kompleks.

4.4 Arah dan Kebijakan Pembangunan Kewilayahan

Salah satu misi dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005 – 2025 adalah terwujudnya pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan ditandai oleh tingkat pembangunan yang makin merata ke seluruh wilayah diwujudkan dengan peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat, termasuk berkurangnya kesenjangan antarwilayah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk itu, strategi dan arah kebijakan pembangunan kewilayahan adalah sebagai berikut :

1. Mendorong pertumbuhan wilayah-wilayah potensial di luar Jawa-Bali dan Sumatera dengan tetap menjaga momentum pertumbuhan di wilayah Jawa-Bali dan Sumatera.



2. Meningkatkan keterkaitan antarwilayah melalui peningkatan perdagangan antarpulau untuk mendukung perekonomian domestik.
3. Meningkatkan daya saing daerah melalui pengembangan sektor-sektor unggulan di tiap wilayah.
4. Mendorong percepatan pembangunan daerah tertinggal, kawasan strategis dan cepat tumbuh, kawasan perbatasan, kawasan terdepan, kawasan terluar, dan daerah rawan bencana.
5. Mendorong pengembangan wilayah laut dan sektor-sektor kelautan.

Strategi pengembangan wilayah dilaksanakan dalam kerangka sinergi pusat-daerah dan antardaerah dalam seluruh proses mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi yang mencakup kerangka kebijakan, regulasi, anggaran, kelembagaan, dan pengembangan wilayah. Salah satu faktor terpenting dalam sinergi pusat dan daerah adalah terwujudnya sinergi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah sehingga setiap kebijakan dirumuskan dengan memperhatikan dan menampung aspirasi daerah, serta mengutamakan penyelesaian permasalahan secara nyata di daerah. Selain itu, sinergi kebijakan juga dimaksudkan agar pemerintah daerah mampu memahami dan melaksanakan kebijakan pemerintah pusat dengan efisien dan efektif, serta mendukung pelaksanaan kebijakan tersebut dengan berbagai sumber daya yang tersedia.

Sinergi dalam perencanaan kebijakan pembangunan pusat dan daerah, baik lima tahunan maupun tahunan akan dilaksanakan dengan mengoptimalkan penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di semua tingkat pemerintahan (desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi dan nasional) sehingga terwujud sinkronisasi antara kebijakan, program dan kegiatan antarsektor, antarwaktu, antarwilayah, dan antara pusat dan daerah. Selain itu, Musrenbang juga diharapkan dapat lebih mendorong terciptanya proses partisipatif semua pelaku pembangunan dan berkembangnya transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Sinergi dalam kerangka regulasi diarahkan untuk mendorong harmonisasi peraturan perundang-undangan baik dalam bentuk Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri dan Peraturan Daerah sehingga mendukung pelaksanaan program dan kegiatan yang tercantum dalam RPJMN 2010-2014. Selain itu, sinergi juga diarahkan untuk meningkatkan kesepahaman, kesepakatan dan ketaatan dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan. Sinergi tersebut dilaksanakan selaras dengan upaya penataan dan penguatan kerangka perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah melalui restrukturisasi dan penataan instrumen pendanaan melalui transfer ke daerah termasuk dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK) dan dana bagi hasil (DBH) yang secara

keseluruhan disebut dana perimbangan (DP), serta dana otonomi khusus (Dana Otsus) untuk menjaga harmonisasi kepentingan nasional dan kebutuhan daerah.

Selain itu, dalam upaya menjamin efektivitas pengelolaan dan pemanfaatan dana dekonsentrasi untuk mencapai prioritas pembangunan nasional, memperkuat kapasitas pemerintah daerah, dan meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah, langkah yang akan ditempuh dalam lima tahun mendatang adalah (1) mempertegas kerangka organisasi dan personil pelaksana pemanfaatan dana dekonsentrasi; (2) sinkronisasi perencanaan program antara kementerian/lembaga dan satuan kerja perangkat daerah; dan (3) penentuan sasaran fungsional program secara bersama.

Sinergi Pusat-Daerah dalam bidang pemerintahan diarahkan untuk memperbaiki tata kelola kelembagaan pemerintahan daerah dan meningkatkan kapasitas aparatur daerah. Dalam upaya memperbaiki tata kelola pemerintahan daerah akan dilakukan upaya percepatan reformasi organisasi perangkat daerah agar mampu menyelenggarakan urusan pemerintahan secara lebih efisien dan efektif, meningkatkan mutu dan jangkauan publik pelayanan sesuai dengan standar pelayanan minimal (SPM) yang ditetapkan oleh pemerintah Pusat, melaksanakan kaidah penyelenggaraan pemerintahan yang baik; serta meningkatkan daya saing daerah. Sementara itu, upaya peningkatan kapasitas aparatur daerah diarahkan untuk menjadi aparatur yang lebih handal, kompeten dan profesional dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah.

Dalam mempercepat pengembangan wilayah akan dilakukan upaya untuk mendorong penataan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang dengan prinsip harmonisasi kepentingan nasional dan kebutuhan daerah serta keserasian antardaerah. Strategi pengembangan wilayah ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Kementerian/Lembaga dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) kementerian/lembaga dengan memperhatikan potensi dan permasalahan wilayah serta menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Sejalan dengan pelaksanaan 11 prioritas nasional, arah dan kebijakan pengembangan kewilayahan ditujukan untuk mewujudkan sasaran-sasaran 11 prioritas nasional sejalan dengan isu strategis yang ada di setiap wilayah.

4.4.1 Pengembangan Wilayah Pulau-Pulau Besar

Kebijakan pengembangan wilayah diarahkan untuk mendorong percepatan pembangunan di wilayah Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua dengan tetap mempertahankan momentum pembangunan di wilayah Jawa-Bali dan Sumatera. Percepatan pembangunan wilayah ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta mengurangi kesenjangan.



I. Pengembangan Wilayah Sumatera

Wilayah pulau Sumatera merupakan salah satu pulau terbesar di Indonesia yang berperan penting dalam mendukung peningkatan kinerja pembangunan nasional. Wilayah Sumatera memiliki posisi geografis yang relatif strategis di wilayah barat Indonesia dan berhadapan langsung dengan kawasan Asia Timur yang menjadi salah satu pusat perekonomian dunia dan memiliki hubungan interaksi paling dekat dengan pulau Jawa sebagai pusat perekonomian di Indonesia.

Pembangunan wilayah Sumatera diarahkan untuk menjadi pusat produksi dan industri pengolahan hasil pertanian tanaman pangan, perkebunan, perikanan; lumbung energi nasional, pusat perdagangan dan pariwisata sehingga wilayah Sumatera menjadi salah satu wilayah utama dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN. Sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), pengembangan wilayah Sumatera diarahkan untuk (1) memantapkan interaksi antar-kawasan pesisir timur, kawasan tengah, dan kawasan, pesisir barat Sumatera melalui pengembangan sistem jaringan transportasi darat, laut, dan transportasi udara lintas Sumatera yang handal; (2) mendorong berfungsinya pusat-pusat permukiman perkotaan sebagai pusat pelayanan jasa koleksi dan distribusi di Pulau Sumatera; (3) mengembangkan akses bagi daerah terisolir dan pulau-pulau kecil di pesisir barat dan timur Sumatera sebagai sentra produksi perikanan, pariwisata, minyak dan gas bumi ke pusat kegiatan industri pengolahan serta pusat pemasaran lintas pulau dan lintas negara; (4) mempertahankan kawasan lindung sekurang-kurangnya 40% dari luas Pulau Sumatera dalam rangka mengurangi resiko dampak bencana lingkungan yang dapat mengancam keselamatan masyarakat dan asset-asset sosial-ekonominya yang berbentuk prasarana, baik pusat permukiman maupun kawasan budidaya; (5) mengembangkan komoditas unggulan wilayah yang memiliki daya saing tinggi melalui kerjasama lintas sektor dan lintas wilayah provinsi dalam pengelolaan dan pemasarannya dalam rangka mendorong kemandirian akses ke pasar global dengan mengurangi ketergantungan pada negara-negara tetangga; (6) menghindari konflik pemanfaatan ruang pada kawasan perbatasan lintas wilayah meliputi lintas wilayah provinsi, lintas wilayah kabupaten dan kota; (7) mempertahankan dan melestarikan budaya lokal dari pengaruh negatif globalisasi dan liberalisasi perdagangan dunia; (8) memantapkan keterkaitan antara kawasan andalan, kawasan budidaya lainnya, berikut kota-kota pusat-pusat kegiatan di dalamnya dengan kawasan-kawasan dan pusat-pusat pertumbuhan antar pulau di wilayah nasional, serta dengan pusat-pusat pertumbuhan di kawasan subregional ASEAN, Asia Pasifik dan kawasan internasional lainnya.

Pusat-pusat pengembangan di wilayah Sumatera yang merupakan Pusat Kegiatan Nasional (PKN) diarahkan untuk: (1) mendorong pengembangan kota Lhokseumawe, Dumai dan Batam di wilayah Timur dan kota Padang di wilayah Barat sebagai pusat pelayanan primer; (2) mengendalikan pengembangan kawasan perkotaan Medan-Binjai-Deli Serdang, Bandar Lampung dan sekitarnya (dsk), dan Palembang dsk,

sebagai pusat pelayanan primer yang sesuai dengan daya dukung lingkungannya; dan (3) mendorong pengembangan kota Pekanbaru dan Jambi sebagai pusat pelayanan sekunder.

II. Pengembangan Wilayah Jawa-Bali

Pengembangan wilayah Jawa dan Bali sebagai pusat kegiatan ekonomi nasional memiliki tantangan yang kompleks. Wilayah Jawa Bali relatif maju dan berkembang dibanding wilayah lainnya. Namun, dalam 20 tahun ke depan Wilayah Jawa Bali akan menghadapi berbagai isu strategis. *Pertama*, peningkatan jumlah penduduk perkotaan. *Kedua*, perubahan struktur ekonomi yang mengarah pada peningkatan sektor jasa. *Ketiga*, menurunnya daya dukung sumber daya alam dan lingkungan. *Keempat*, meningkatnya kelas menengah yang disertai dengan menguatnya kesadaran tentang hak-hak dasar. *Kelima*, pergeseran cara pandang, nilai dan gaya hidup yang lebih mengglobal. Berbagai isu strategis tersebut akan mempunyai implikasi pada perubahan tatanan sosial, ekonomi, sumberdaya, tata ruang, budaya dan politik.

Dalam lima tahun ke depan, pembangunan regional Jawa-Bali diarahkan untuk tetap mempertahankan fungsi lumbung pangan nasional, mengembangkan industri pengolahan secara terkendali, memperkuat interaksi perdagangan, serta meningkatkan mutu pelayanan jasa dan pariwisata bertaraf internasional sebagai wilayah utama dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN, dengan tetap memperhatikan keseimbangan ekosistem dan kaidah pembangunan yang berkelanjutan.

Sesuai dengan arahan RTRWN, pengembangan wilayah Jawa-Bali diarahkan untuk: (1) mempertahankan Pulau Jawa-Bali sebagai lumbung pangan nasional melalui berbagai upaya menetapkan dan mempertahankan kawasan produksi pangan; (2) mempertahankan dan merehabilitasi kawasan lindung yang semakin terdesak oleh kegiatan budidaya hingga mencapai luasan minimal 30% dari keseluruhan luas Wilayah Pulau Jawa-Bali, khususnya di Pulau Jawa bagian selatan dan Pulau Bali bagian tengah; (3) mempertahankan sumber-sumber air dan merehabilitasi daerah resapan air untuk menjaga ketersediaan air sepanjang tahun; (4) mengendalikan pertumbuhan pusat-pusat permukiman perkotaan dan perdesaan yang berpotensi mengganggu kawasan-kawasan yang rawan bencana serta mengancam keberadaan kawasan lindung dan kawasan produksi pangan melalui pengendalian aspek kependudukan dan kegiatan sosial-ekonominya; (5) mengendalikan secara ketat pengembangan industri hingga ambang batas toleransi lingkungan yang aman bagi keberlanjutan pembangunan; (6) mengintegrasikan kegiatan industri ke dalam zona-zona dan kawasan-kawasan industri yang telah ditetapkan; (7) mendorong pusat-pusat permukiman perkotaan sebagai pusat pelayanan jasa koleksi dan distribusi di Pulau Jawa-Bali; (8) mengembangkan zona-zona pemanfaatan minyak dan gas untuk wilayah perairan laut dan/atau lepas pantai; (9) mempertahankan dan merehabilitasi kawasan cagar budaya.



Pusat-pusat pengembangan di Wilayah Jawa-Bali yang merupakan Pusat Kegiatan Nasional (PKN) diarahkan untuk: (1) mengendalikan pengembangan secara fisik kawasan perkotaan Jabodetabek, Bandung, Gerbangkertosusila, dan Denpasar sebagai pusat pelayanan primer dengan memperhatikan daya dukung lingkungannya; (2) mendorong pengembangan kawasan perkotaan Yogyakarta dan sekitarnya dan perkotaan Semarang sebagai pusat pelayanan primer; (3) mendorong pengembangan kawasan perkotaan Serang dan sekitarnya, Cilacap dan sekitarnya, Cirebon dan sekitarnya, dan Surakarta dan sekitarnya sebagai pusat pelayanan sekunder.

III. Pengembangan Wilayah Kalimantan

Pengembangan wilayah Kalimantan mempunyai peran yang sangat penting dalam mendukung peningkatan kinerja pembangunan nasional. Wilayah Kalimantan memiliki posisi geografis yang relatif strategis di wilayah tengah Indonesia, berhadapan langsung dengan pulau-pulau besar di Indonesia. Di sebelah utara, wilayah Kalimantan berbatasan langsung dengan Negara Malaysia. Posisi ini sangat penting mengingat dalam konteks penguatan keterkaitan antarwilayah.

Pembangunan wilayah Kalimantan diarahkan untuk meningkatkan produktivitas dan nilai tambah perkebunan, peternakan, perikanan, dan pengolahan hasil hutan; serta meningkatkan nilai tambah hasil pertambangan dan berfungsi sebagai lumbung energi nasional dengan tetap memperhatikan keseimbangan ekosistem dan kaidah pembangunan yang berkelanjutan. Sesuai dengan RTRWN, pengembangan wilayah Kalimantan diarahkan untuk: (1) memelihara dan memulihkan kawasan-kawasan yang berfungsi lindung dan kritis lingkungan dalam rangka mendukung keberlanjutan pemanfaatan sumber daya kehutanan, pertambangan, dan pertanian, serta sumberdaya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil, serta mengurangi resiko dampak bencana alam; (2) mendayagunakan posisi strategis secara geografis yang berdekatan dengan negara bagian Malaysia di Sarawak dan Sabah dalam kerangka kerjasama ekonomi subregional BIMP-EAGA (*Brunei Darussalam – Indonesia – Malaysia – Phillipines East ASEAN Growth Area*); (3) mendorong percepatan penanganan kawasan perbatasan antar negara dengan negara Malaysia di Serawak dan Sabah sebagai beranda depan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia di Pulau Kalimantan; (4) meningkatkan aksesibilitas internal wilayah Pulau Kalimantan untuk mewujudkan sinergi pengembangan potensi wilayah dan pemerataan tingkat perkembangan antar wilayah melalui percepatan fungsionalisasi jaringan jalan lintas Kalimantan secara terpadu dengan pengembangan jaringan angkutan sungai, angkutan laut, jaringan jalan rel kereta api dan angkutan udara; (5) mendorong peran kawasan andalan sebagai penggerak pengembangan ekonomi wilayah Kalimantan; (6) mengembangkan industri pengolahan yang berbasis pada sektor kelautan, pertanian, perkebunan, pertambangan, dan kehutanan secara berkelanjutan, serta industri pariwisata yang berbasis pada penguatan dan pengembangan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat lokal dan kelestarian

lingkungan hidup; (7) mendorong pusat-pusat permukiman perkotaan sebagai pusat pelayanan jasa koleksi dan distribusi di Pulau Kalimantan.

Pusat-pusat pengembangan di Pulau Kalimantan yang merupakan Pusat Kegiatan Nasional (PKN) diarahkan untuk: (1) mendorong pengembangan kota Balikpapan, Banjarmasin, dan Pontianak sebagai pusat pelayanan primer; (2) mendorong pengembangan kota Palangka Raya, Samarinda, Bontang, dan Tarakan, sebagai pusat pelayanan sekunder. Selanjutnya, pengembangan Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) di Pulau Kalimantan terutama kawasan perbatasan negara diarahkan untuk mendorong pengembangan Kota Aruk, Jagoibabang, Nangabadau, Entikong, Jasa, Nunukan, Simanggaris, Long Midang, dan Long Pahangai.

IV. Pengembangan Wilayah Sulawesi

Pengembangan wilayah Sulawesi, sebagai salah satu pulau besar di Indonesia, sangat penting dalam mendukung peningkatan kinerja pembangunan nasional. Wilayah Sulawesi berpotensi besar sebagai pusat pertumbuhan di kawasan Timur Indonesia dan sub-regional ASEAN. Dengan kondisi ini, wilayah Sulawesi memiliki akses perdagangan yang cukup strategis.

Pembangunan Wilayah Sulawesi diarahkan untuk menjadi salah satu lumbung pangan nasional dengan meningkatkan produktivitas dan nilai tambah pertanian tanaman pangan, perkebunan dan perikanan; mengembangkan bioenergi; serta meningkatkan dan memperluas perdagangan, jasa dan pariwisata bertaraf internasional. Sesuai dengan RTRWN pengembangan wilayah Sulawesi diarahkan untuk: (1) mendorong perkembangan peran Pulau Sulawesi sebagai salah satu wilayah yang memiliki peluang-peluang eksternal cukup besar; (2) mengembangkan komoditas unggulan Pulau Sulawesi yang memiliki daya saing tinggi melalui kerjasama lintas sektor dan lintas wilayah provinsi dalam pengelolaan dan pemasarannya; (3) memprioritaskan kawasan-kawasan tertinggal dan kawasan perbatasan dalam rangka pencapaian pemerataan tingkat perkembangan antar wilayah, termasuk pengembangan pulau-pulau kecil dan gugus kepulauan; (4) memanfaatkan potensi sumber daya di darat dan laut secara optimal serta mengatasi potensi konflik lintas wilayah provinsi yang terjadi di beberapa wilayah perairan dan daratan; (5) mempertahankan keberadaan sentra-sentra produksi pangan nasional, khususnya bagi sawah-sawah beririgasi teknis dari ancaman konversi lahan; (6) memantapkan keterkaitan antara kawasan andalan dan kawasan budidaya lainnya, berikut kota-kota pusat-pusat kegiatan di dalamnya, dengan kawaskawasan dan pusat-pusat pertumbuhan antar pulau di wilayah nasional, serta dengan pusat-pusat pertumbuhan di kawasan subregional ASEAN, Asia Pasifik dan kawasan internasional lainnya dalam menciptakan daya saing wilayah; (7) mempertahankan dan merehabilitasi kawasan lindung hingga mencapai luasan minimal 40% dari luas Pulau Sulawesi dalam rangka mengurangi resiko dampak bencana lingkungan yang dapat mengancam keselamatan masyarakat dan asset-asset



sosial-ekonominya yang berbentuk prasarana, pusat permukiman maupun kawasan budidaya; (8) mempertahankan dan merehabilitasi kawasan cagar budaya sebagai aset sosialbudaya masyarakat yang memiliki nilai-nilai budaya tradisional dan kearifan lokal; (9) mengembangkan industri pengolahan yang berbasis pada sektor kelautan, pertanian, perkebunan, pertambangan, dan kehutanan secara berkelanjutan; dan (10) mengembangkan pemanfaatan ruang untuk mewadahi dinamika kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya.

Pusat-Pusat pengembangan di Pulau Sulawesi yang merupakan Pusat Kegiatan Nasional (PKN) diarahkan untuk: (1) mendorong optimalisasi pengembangan kawasan perkotaan Maminasata (Makassar–Maros–Sungguminasa–Takalar) dan Manado - Bitung sebagai pusat pelayanan primer yang sesuai dengan daya dukung lingkungannya; dan (2) mendorong pengembangan kota-kota Gorontalo, Palu, Kendari dan Mamuju sebagai pusat pelayanan sekunder.

V. Pengembangan Wilayah Nusa Tenggara

Pengembangan wilayah Nusa Tenggara, sebagai salah satu wilayah kepulauan dengan gugusan pulau yang tersebar dan berbatasan dengan negara tetangga Timor Leste, perlu dilakukan dengan kebijakan dan program yang terpadu dan tepat sesuai dengan potensi yang dimiliki dan berbagai hambatan yang dihadapi. Wilayah Kepulauan Nusa Tenggara yang terletak di sebelah timur wilayah Jawa-Bali belum sepenuhnya mendapat manfaat dari interaksi ekonomi dengan pusat kegiatan ekonomi nasional tersebut.

Pembangunan wilayah Kepulauan Nusa Tenggara diarahkan untuk meningkatkan produktivitas dan nilai tambah perkebunan, peternakan dan perikanan dengan memperhatikan keterkaitan wilayah-wilayah pulau. Sesuai dengan RTRWN, pengembangan wilayah Nusa Tenggara diarahkan untuk: (1) mengembangkan kota-kota di kawasan pesisir sebagai pusat pelayanan kegiatan industri kemaritiman terpadu sebagai sektor basis yang didukung oleh prasarana dan sarana yang memadai, khususnya transportasi, energi, dan sumber daya air; (2) mengembangkan wilayah darat, laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil sebagai satu kesatuan wilayah Kepulauan Nusa Tenggara melalui kegiatan pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang yang terpadu didukung oleh prasarana dan sarana yang memadai; (3) meningkatkan aksesibilitas antar kota-kota pesisir yang menghubungkan poros Banda Aceh–Atambua, sehingga membentuk keterkaitan sosial ekonomi yang kuat; (4) meningkatkan keterkaitan pengembangan antarkawasan (Kawasan Andalan dan Kawasan Andalan Laut) untuk mengoptimalkan potensi wisata budaya dan wisata alam, termasuk wisata bahari, dengan mengembangkan jalur wisata terpadu Bali -Lombok –Komodo–Tana Toraja; (5) menetapkan fokus spesialisasi penanganan komoditas unggulan termasuk pemasarannya, yang berorientasi ekspor, dengan mengutamakan pengelolaan sumberdaya alam terbarukan berdasarkan prinsip kemanfaatan bersama baik

antarwilayah maupun antarkawasan; (6) memanfaatkan keberadaan Forum Kerjasama Daerah dan Forum Kerjasama Ekonomi Internasional baik secara bilateral dengan Australia dan Timor Leste, maupun secara multilateral dalam konteks kerjasama ekonomi sub-regional; (7) meningkatkan perlindungan kawasan konservasi nasional di Kepulauan Nusa Tenggara khususnya konservasi laut agar kelestariannya terpelihara; (8) mengelola kawasan perbatasan darat dengan Timor Leste dan Kawasan perbatasan laut dengan Timor Leste dan Australia sebagai 'beranda depan' Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pusat pengembangan di Wilayah Nusa Tenggara yang merupakan Pusat Kegiatan Nasional (PKN) diarahkan untuk mendorong pengembangan kota Mataram dan Kupang sebagai pusat pelayanan primer yang sesuai dengan daya dukung lingkungannya.

VI. Pengembangan Wilayah Maluku

Pengembangan wilayah Kepulauan Maluku, sebagai salah satu wilayah kepulauan dengan gugusan pulau yang tersebar dan berbatasan dengan negara tetangga, perlu dilakukan dengan kebijakan dan program yang terpadu dan tepat sesuai dengan potensi yang dimiliki dan berbagai hambatan yang dihadapi. Pembangunan wilayah Maluku diarahkan untuk meningkatkan produktivitas dan nilai tambah perkebunan, peternakan dan perikanan dengan memperhatikan keterkaitan wilayah-wilayah pulau.

Sesuai dengan RTRWN, pengembangan wilayah Maluku diarahkan untuk: (1) mengembangkan kota-kota pesisir sebagai pusat pelayanan kegiatan industri kemaritiman terpadu yang merupakan sektor basis dengan dukungan prasarana dan sarana yang memadai, khususnya transportasi, energi, dan sumber daya air; (2) mengembangkan wilayah darat, laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil sebagai satu kesatuan wilayah Kepulauan Maluku melalui kegiatan pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang yang terpadu yang didukung oleh prasarana dan sarana yang memadai; (3) mempertahankan kawasan konservasi untuk menjamin daya dukung lingkungan yang optimal bagi pengembangan wilayah; (4) memacu pertumbuhan ekonomi wilayah Kepulauan Maluku melalui pengembangan sektor-sektor unggulan yang berbasis sumber daya setempat dan meningkatkan keterkaitan antarpusat-pusat pertumbuhan di darat, pesisir, dan pulau-pulau kecil; (5) memanfaatkan sumber daya alam secara produktif dan efisien, agar terhindar dari pemborosan sehingga dapat memberi manfaat sebesar-besarnya berdasarkan prinsip-prinsip kelestarian; serta (6) meningkatkan ketersediaan, kualitas, dan memperluas jangkauan pelayanan prasarana dasar, khususnya transportasi laut dan udara yang didukung oleh transportasi antar moda secara terpadu dan optimal dengan mengikutsertakan dunia usaha.

Pengembangan PKN di Kepulauan Maluku diarahkan untuk mengendalikan pengembangan kota Ambon dan Ternate - Sofifi, sebagai pusat pelayanan primer yang sesuai dengan daya dukung lingkungannya.

VII. Pengembangan Wilayah Papua

Pengembangan wilayah Pulau Papua sebagai salah satu pulau terbesar di Indonesia dengan posisi paling timur dan berbatasan langsung dengan negara tetangga Papua Nugini memiliki tantangan yang lebih sulit jika dibanding dengan wilayah lainnya. Tantangan terbesar adalah memberikan perhatian yang sama terhadap seluruh wilayah pesisir, wilayah pegunungan, dan wilayah dataran, serta sekaligus membangun keterkaitan antarwilayah dalam satu kesatuan tata ruang wilayah.

Pembangunan wilayah Papua diarahkan untuk untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia; produktivitas dan nilai tambah perkebunan, peternakan dan perikanan dengan memperhatikan keterkaitan wilayah-wilayah pulau. Sesuai RTRWN, pengembangan wilayah Papua diarahkan untuk: (1) mendukung peningkatan serta memperkuat persatuan, kesatuan dan keutuhan kehidupan bangsa dan pertahanan negara; (2) menempatkan hak ulayat dalam penataan ruang sebagai salah satu upaya untuk mempertahankan nilai-nilai sosial budaya setempat; (3) memanfaatkan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara produktif dan efisien agar terhindar dari pemborosan dan penurunan daya dukung lingkungan sehingga dapat memberi manfaat sebesar-besarnya berdasarkan prinsip-prinsip kelestarian dan berkelanjutan; (4) mempertahankan kawasan lindung sekurang-kurangnya 50 persen dari luas wilayah Pulau Papua; (5) memacu pertumbuhan ekonomi wilayah Pulau Papua melalui pengembangan sektor-sektor unggulan yang berbasis sumber daya setempat dan meningkatkan keterkaitan antarpusat-pusat pertumbuhan; (6) menampung kegiatan ekonomi, memperluas lapangan kerja, dan sekaligus memenuhi fungsi sebagai pusat pelayanan usaha melalui pengembangan kawasan dan pusat pertumbuhan; (7) meningkatkan keterkaitan yang saling menguntungkan antara kawasan andalan dan tertinggal dalam rangka peningkatan kesejahteraan ekonomi daerah di sekitar kawasan andalan; (8) meningkatkan ketersediaan dan kualitas, serta memperluas jangkauan pelayanan prasarana dasar, khususnya transportasi laut yang didukung oleh transportasi antarmoda secara terpadu dan optimal dengan mengikutsertakan dunia usaha; (9) meningkatkan pengembangan wilayah pedalaman dan perbatasan yang tertinggal dan terisolasi dengan menyeraskan laju pertumbuhan antar wilayah.

Pusat-pusat pengembangan di Pulau Papua yang merupakan Pusat Kegiatan Nasional (PKN) diarahkan untuk: (1) mendorong pengembangan kota Sorong dan Jayapura sebagai pusat pelayanan primer yang sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan; (2) mendorong pengembangan kota Manokwari dan Timika sebagai pusat pelayanan sekunder yang sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan.

4.4.2 Strategi Pengembangan Wilayah Laut

Pengembangan wilayah laut dilaksanakan melalui pendekatan kewilayahan terpadu dengan memperhatikan aspek-aspek geologi, oseanografi, biologi atau

keragaman hayati, habitat, potensi mineral dan energi, potensi perikanan, potensi wisata bahari, potensi industri maritim, potensi transportasi, dan teknologi. Pendekatan ini merupakan sinergi dari pengembangan pulau-pulau besar dalam konteks pengembangan wilayah dan pemerataan pembangunan. Pendekatan ini memandang wilayah laut Indonesia atas dua fungsi: (i) sebagai perekat integrasi kegiatan perekonomian antarwilayah, dan (ii) sebagai pendukung pengembangan potensi setiap wilayah.

Pengembangan wilayah laut didasarkan pada sektor unggulan dan potensi keterkaitan depan dan belakang dengan sektor-sektor lain. Melalui pendekatan ini, pengembangan wilayah laut dikelompokkan sebagai berikut: (1) wilayah pengembangan kelautan Sumatera; (2) wilayah pengembangan kelautan Malaka; (3) wilayah pengembangan kelautan Sunda; (4) wilayah pengembangan kelautan Jawa; (5) wilayah pengembangan kelautan Natuna; (6) wilayah pengembangan kelautan Makassar-Buton; (7) wilayah pengembangan kelautan Banda-Maluku; (8) wilayah pengembangan kelautan Sawu, dan (9) wilayah pengembangan kelautan Papua-Sulawesi. Dari sepuluh wilayah pengembangan kelautan ini, dengan memperhatikan fungsi strategisnya dalam penguatan keterkaitan antarwilayah maka dipilih lima wilayah prioritas pengembangan untuk periode 2010-2014 yaitu Wilayah Pengembangan Kelautan Sumatera, Malaka, Jawa, Makassar-Buton, dan Banda-Maluku.

I. Wilayah Pengembangan Kelautan Sumatera

Wilayah pengembangan kelautan Sumatera terletak di sebelah barat Pulau Sumatera yang memanjang dari Sabang di bagian utara hingga Lampung di bagian selatan. Potensi perikanan meliputi ikan hias di Pulau Breuh dan Sibolga, ikan kakap, kerapu, kerang-kerangan, teripang, dan tiram merata di bagian barat Sumatera. Di samping itu juga terdapat potensi rumput laut di pesisir Painan dan Lampung. Aneka jenis terumbu karang dapat ditelusuri di Kepulauan Simeulue dan Mentawai. Potensi migas ditemukan di Cekungan Busur Muka lepas pantai Bengkulu serta potensi pasir besi di sepanjang pantai Padang. Potensi wisata bahari dan budaya sangat potensial dikembangkan di Kepulauan Nias dan Mentawai. Wilayah ini hanya dilewati oleh satu jalur pelayaran nasional dan nusantara, namun wilayah perbatasan internasional di bagian barat merupakan jalur pelayaran internasional yang cukup sibuk.

Arah kebijakan pengembangan wilayah kelautan Sumatera adalah pengembangan industri berbasis kelautan, khususnya pengolahan hasil laut, dengan memperkuat keterkaitan dengan wilayah Jawa. Strategi yang ditempuh adalah: (1) penyiapan sumber daya manusia terampil di bidang kelautan; (2) pembangunan transportasi laut dan wilayah pesisir; (3) peningkatan kapasitas energi listrik; (4) pengembangan skema pembiayaan perbankan yang mudah diakses nelayan dan pelaku usaha kecil menengah di kawasan pesisir; (5) dan fasilitasi pengembangan sistem jaminan atau perlindungan risiko.



Arah kebijakan dan strategi wilayah kelautan ini diintegrasikan dengan arah kebijakan dan strategi wilayah Sumatra dan Jawa-Bali.

II. Wilayah Pengembangan Kelautan Selat Malaka

Secara geografis wilayah pengembangan kelautan Selat Malaka terbentang dari perairan Selat Malaka hingga Kepulauan Riau, serta berbatasan dengan perairan Aceh di utara, perairan Malaysia dan Singapura di timur, wilayah pengembangan kelautan Natuna di selatan, dan daratan Sumatera di barat. Wilayah ini merupakan jalur pelayaran internasional yang padat dan wilayah yang berisiko tinggi terjadinya konflik dengan negara tetangga. Potensi granit tua dan endapan pasir ditemukan di Kepulauan Riau. Potensi timah terdapat di Kepulauan Singkep, sedangkan pasir kuarsa yang cukup besar ditemukan di lepas pantai Riau dekat Pulau Rupat. Wilayah ini memiliki potensi perikanan budidaya (kakap putih, kerapu, kerang-kerangan, teripang, tiram, dan rumput laut. Potensi perikanan tangkap (ikan hias) juga ditemukan di sekitar Pulau Sabang dan Pulau Bintan. Keragaman hayati di perairan ini dicirikan oleh keluarga Moluska dan Teripang serta spesies penyu. Habitat terumbu karang didominasi oleh terumbu karang tepi (*fringing reef*). Namun, padatnya aktivitas pelayaran dan eksplorasi migas di wilayah ini menghadirkan ancaman polusi pencemaran minyak dan limbah lainnya.

Pengembangan wilayah kelautan Selat Malaka diarahkan pada peningkatan keamanan dan ketertiban serta keberlanjutan ekosistem laut sehingga pemanfaatan sumber daya alam bisa dilakukan secara optimal. Untuk itu strategi yang diperlukan adalah: (1) penegasan batas-batas teritorial dan yuridiksi wilayah dengan negara tetangga; (2) peningkatan pengawasan kawasan perbatasan untuk menghindari penyelundupan, perompakan, illegal fishing, dan perdagangan pasir ilegal; (3) penegakan peraturan terkait dengan pemeliharaan dan pelestarian lingkungan laut; (4) pemanfaatan pulau-pulau terdepan sebagai kawasan wisata atau pusat konservasi satwa laut.

Arah kebijakan dan strategi wilayah kelautan ini diintegrasikan dengan arah kebijakan dan strategi wilayah Sumatra dan Jawa-Bali.

III. Wilayah Pengembangan Kelautan Jawa

Wilayah pengembangan kelautan Jawa terletak di antara Pulau Kalimantan dan Pulau Jawa. Di sebelah timur wilayah ini berbatasan dengan wilayah pengembangan kelautan Makassar dan di barat berbatasan dengan Pulau Sumatera. Karena terletak di wilayah laut dalam di antara pulau-pulau besar, perairan ini merupakan jalur pelayaran nasional dan nusantara yang padat. Pelayaran internasional juga melintasi bagian timur perairan ini. Ancaman turunnya kualitas lingkungan berasal dari pencemaran minyak dan limbah yang dialirkan sungai-sungai di Pulau Jawa.

Pengembangan wilayah perairan ini diarahkan pada penguatan fungsi wilayah kelautan sebagai perekat integrasi ekonomi antarwilayah (antarpulau) dengan tetap menjaga kelestarian ekosistem laut. Untuk itu strategi yang diterapkan adalah: (1) peningkatan sistem transportasi laut untuk mempermudah arus barang antarpulau khususnya ke wilayah timur Indonesia; (2) penegakan peraturan terkait dengan pemeliharaan dan pelestarian lingkungan laut; (3) pengendalian pembuangan limbah industri dan rumah tangga melalui sungai-sungai yang bermuara di perairan Jawa; (4) pengendalian erosi di wilayah daerah aliran sungai (DAS) untuk menghindari pendangkalan pelabuhan ikan dan pelabuhan laut; (5) pengembangan perikanan budidaya; dan (6) minimalisasi risiko pencemaran perusakan habitat laut oleh kegiatan eksplorasi dan eksploitasi migas lepas pantai.

Arah kebijakan dan strategi wilayah kelautan ini diintegrasikan dengan arah kebijakan dan strategi wilayah Jawa-Bali dan Kalimantan.

IV. Wilayah Pengembangan Kelautan Makassar-Buton

Secara geografis, wilayah pengembangan kelautan Makassar diapit oleh Pulau Sulawesi di sebelah timur dan Pulau Kalimantan di sebelah barat. Kecuali Selat Makassar, tingkat pemanfaatan potensi perikanan masih memungkinkan untuk ditingkatkan. Dari sisi sistem transportasi, wilayah ini dilalui jalur pelayaran nasional dan Nusantara yang cukup aktif. Di samping itu Selat Makassar juga dilintasi jalur pelayaran internasional yang cukup padat.

Kebijakan pengembangan wilayah ini diarahkan pada optimalisasi peran strategis kelautan dalam meningkatkan interaksi perdagangan intra pulau (antar provinsi di Sulawesi) maupun dalam mendukung peran wilayah Sulawesi sebagai penggerak Kawasan Timur Indonesia. Untuk itu strategi yang diterapkan adalah: (1) peningkatan sistem transportasi laut yang menghubungkan provinsi-provinsi di Pulau Sulawesi; (2) pemantapan sistem transportasi laut untuk memperkuat fungsi intermediasi Sulawesi bagi KBI dan KTI; (3) pembangunan pelabuhan-pelabuhan ikan dalam klaster-klaster industri pengolahan hasil laut; (4) pengembangan pelabuhan hub ekspor komoditas unggulan; (5) peningkatan pengawasan jalur pelayaran internasional

untuk mencegah aktivitas penyelundupan; (6) pengembangan lembaga pendidikan dan kurikulum berbasis kelautan (perikanan, pariwisata, perkapalan); (7) pengembangan industri angkutan laut (perkapalan); dan (8) pengembangan wisata bahari.

Arah kebijakan dan strategi wilayah kelautan ini diintegrasikan dengan arah kebijakan dan strategi wilayah Kalimantan, Sulawesi, dan Nusa Tenggara.

V. Wilayah Pengembangan Kelautan Banda-Maluku

Wilayah pengembangan kelautan Banda-Maluku terletak di Kawasan Timur Indonesia (KTI), berbatasan dengan wilayah pengembangan kelautan Papua di utara, dengan daratan Pulau Papua di timur, dengan wilayah pengembangan kelautan Sawu di selatan, dan dengan wilayah pengembangan kelautan Makassar di barat. Potensi migas ditemukan di daerah kepala burung, Seram dan Halmahera. Bahan semen juga ditemukan di Pulau Misool. Namun demikian wilayah ini baru dilayani beberapa jalur pelayaran nasional dan nusantara. Dengan demikian ancaman pencemaran laut masih rendah, terlihat dari relatif terjaganya keragaman hayati yang tinggi. Wilayah ini merupakan tempat bertelur beberapa spesies seperti penyu-penyuan. Potensi perikanan dan budidaya rumput laut juga sangat tinggi dengan tingkat pemanfaatan yang relatif rendah. Karakter gugus-gugus pulau yang khas juga merupakan potensi wisata alam wilayah ini seperti ditemukan di perairan Raja Ampat.

Arah kebijakan pengembangan wilayah kelautan Banda-Maluku adalah perintisan pengembangan industri berbasis sumber daya kelautan dan wisata bahari. Sejalan dengan arah ini, strategi yang diperlukan meliputi: (1) pengembangan sumber daya manusia berkecakupan tinggi di bidang kelautan (pendidikan dan pelatihan); (2) pengembangan komoditas unggulan bernilai tinggi berbasis kelautan seperti kerang mutiara dan ikan hias; (3) pengembangan industri angkutan laut (perkapalan); (4) pemberdayaan dan pengorganisasian masyarakat khususnya wilayah pesisir untuk memperkuat modal sosial; (5) peningkatan akses permodalan bagi nelayan; (6) pengembangan wisata bahari.

Arah kebijakan dan strategi wilayah kelautan ini diintegrasikan dengan arah kebijakan dan strategi wilayah Sulawesi, Nusa Tenggara, dan Papua.

4.4.3. Pengembangan Kawasan

Dalam upaya mendukung percepatan pembangunan wilayah, kebijakan pembangunan wilayah juga diarahkan untuk: (1) pengembangan kawasan strategis dan cepat tumbuh, (2) pengembangan daerah tertinggal, kawasan perbatasan, dan rawan bencana, (3) pengembangan kawasan perkotaan dan perdesaan, dan (4) penataan dan pengelolaan pertanahan. Strategi yang diterapkan adalah sebagai berikut:

1. Mendorong percepatan pembangunan dan pertumbuhan wilayah-wilayah strategis dan cepat tumbuh sehingga dapat mengembangkan wilayah-wilayah tertinggal di sekitarnya dalam suatu sistem wilayah pengembangan ekonomi yang sinergis, tanpa mempertimbangkan batas wilayah administrasi, tetapi lebih ditekankan pada pertimbangan keterkaitan mata-rantai proses industri dan distribusi;
2. Meningkatkan keberpihakan pemerintah untuk mengembangkan wilayah-wilayah tertinggal dan terpencil sehingga wilayah-wilayah tersebut dapat tumbuh dan berkembang secara lebih cepat dan dapat mengurangi ketertinggalan pembangunannya dengan daerah lain;
3. Mengembangkan wilayah-wilayah perbatasan dengan mengubah arah kebijakan pembangunan yang selama ini cenderung berorientasi *inward looking* menjadi *outward looking* sehingga dapat dimanfaatkan sebagai pintu gerbang aktivitas ekonomi dan perdagangan dengan negara tetangga;
4. Menyeimbangkan pertumbuhan pembangunan kota-kota metropolitan, besar, menengah, dan kecil dengan mengacu pada sistem pembangunan perkotaan nasional. yang diperlukan untuk mencegah terjadinya pertumbuhan fisik kota yang tidak terkendali (*urban sprawl & conurbation*), seperti yang terjadi di wilayah pantura Pulau Jawa, serta untuk mengendalikan arus migrasi masuk langsung dari desa ke kota-kota besar dan metropolitan, dengan cara menciptakan kesempatan kerja, termasuk peluang usaha, di kota-kota menengah dan kecil, terutama di luar Pulau Jawa;
5. Mempercepat pembangunan kota-kota kecil dan menengah terutama di luar Pulau Jawa, sehingga diharapkan dapat menjalankan perannya sebagai 'motor penggerak' pembangunan wilayah-wilayah di sekitarnya maupun dalam melayani kebutuhan warga kotanya;
6. Mendorong keterkaitan kegiatan ekonomi di wilayah perkotaan dengan kegiatan ekonomi di wilayah perdesaan secara sinergis (hasil produksi wilayah perdesaan merupakan *backward linkages* dari kegiatan ekonomi di wilayah perkotaan) dalam suatu 'sistem wilayah pengembangan ekonomi;'
7. Menerapkan sistem pengelolaan pertanahan yang efisien, efektif, serta melaksanakan penegakan hukum terhadap hak atas tanah dengan menerapkan prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan demokrasi;
8. Mendorong perencanaan wilayah yang peduli/peka terhadap bencana alam, mengingat secara geografis Indonesia berada di wilayah pertemuan tiga lempeng tektonik yang rawan bencana alam.



BAB V

KERANGKA EKONOMI MAKRO 2010—2014

Kerangka ekonomi makro memberikan gambaran mengenai kemajuan ekonomi yang akan dicapai dalam tahun 2010-2014, berdasarkan berbagai langkah kebijakan yang telah dituangkan dalam lima agenda pembangunan dan pembiayaan pembangunannya.

5.1 Keadaan Ekonomi 2009

Secara umum kondisi ekonomi makro pada tahun 2009 adalah sebagai berikut Pertama, perekonomian nasional sedikit menurun setelah mendapatkan imbas global akibat krisis keuangan dunia pada 2008 namun tetap tumbuh cukup tinggi. Pada pertengahan 2009 perekonomian nasional telah mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan yang sejalan dengan membaiknya perekonomian dunia dan mulai naiknya harga-harga komoditi internasional; Kedua, konsumsi domestik sejak awal 2009 menjadi penyumbang utama pertumbuhan ekonomi, terutama terkait dengan terjaganya daya beli masyarakat, kegiatan kampanye Pemilu, dan juga upaya mempercepat penyerapan anggaran; Ketiga, sebagian besar indikator ekonomi domestik menguat sejak awal 2009, seperti keyakinan konsumen meningkat, penjualan barang ritel dan otomotif membaik, aktivitas industri kembali meningkat setelah mengalami penurunan pada akhir tahun 2008.

Dampak krisis global mulai dirasakan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional sejak triwulan IV tahun 2008. Pertumbuhan ekonomi triwulan IV tahun 2008 menurun minus 3,6 persen jika dibandingkan dengan triwulan III tahun 2008 (q-t-q) atau meningkat 5,2 persen (y-o-y), sementara itu pada triwulan sebelumnya ekonomi tumbuh positif, yaitu 6,2 persen pada triwulan I; 6,4 persen pada triwulan II; dan 6,4 persen pada triwulan III (y-o-y). Krisis global—yang berdampak pada turunnya permintaan dunia, menurunnya harga minyak dan komoditas—menyebabkan ekspor barang dan jasa tumbuh negatif 5,5 persen pada triwulan IV tahun 2008 dibanding triwulan sebelumnya. Dampak global juga mendorong pembalikan aliran modal dari Indonesia ke luar negeri, sehingga investasi/Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto (PMTB) hanya tumbuh 0,8 persen pada triwulan IV dibanding triwulan sebelumnya.

Penurunan pertumbuhan ekonomi berlanjut sampai dengan triwulan II tahun 2009. Pertumbuhan ekonomi triwulan I tahun 2009 adalah 4,4 persen dan pada triwulan II laju pertumbuhan menurun menjadi 4 persen. Pada triwulan III tahun 2009 laju pertumbuhan ekonomi meningkat kembali menjadi 4,2 persen yang menunjukkan tanda-tanda pemulihan ekonomi nasional sejalan dengan membaiknya ekonomi dunia.

Pertumbuhan ekonomi sampai dengan triwulan III tahun 2009 tumbuh 4,2

persen. Dari sisi permintaan, pertumbuhan ekonomi didorong oleh pengeluaran pemerintah dan pengeluaran masyarakat yang masing masing tumbuh 15,1 persen dan 5,2 persen. Sementara itu ekspor masih tumbuh negatif, yaitu 14,1 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan ekonomi tinggi terutama didorong oleh sektor pertanian meningkat sebesar 3,4 persen; dan sektor tersier, yaitu sektor listrik, gas dan air; dan pengangkutan dan telekomunikasi yang masing masing tumbuh 13,9 persen dan 17,6 persen.

Perkembangan pertumbuhan ekonomi Indonesia masih dikategorikan memiliki kinerja perekonomian yang baik mengingat banyak negara yang pertumbuhannya negatif, sementara itu Indonesia tumbuh positif 4 persen bersama Cina dan India yang masing masing tumbuh 7,9 persen dan 6,1 persen pada triwulan II tahun 2009.

Untuk mempercepat pemulihan ekonomi, upaya untuk mengurangi kemerosotan ekspor dan lambatnya pertumbuhan investasi semakin ditingkatkan. Di samping itu, konsumsi masyarakat diupayakan untuk tetap dijaga dengan memelihara daya beli masyarakat melalui pengendalian inflasi dan berbagai program pengurangan kemiskinan. Efektivitas pengeluaran pemerintah juga ditingkatkan dengan program stimulus untuk menjaga daya beli masyarakat dan peningkatan investasi. Dengan memperhatikan pengaruh eksternal dan berbagai kebijakan yang diambil, pertumbuhan ekonomi tahun 2009 diperkirakan sekitar 4,3 persen.

Dari sisi moneter, setelah mengalami tekanan akibat gejolak ekonomi dunia tahun 2008, perkembangan indikator moneter diperkirakan akan terus membaik sampai akhir 2009. Laju inflasi yang mencapai 11,1 persen pada tahun 2008 menurun menjadi 2,8 persen pada akhir tahun 2009, seiring dengan menurunnya harga-harga komoditas dunia, penurunan harga BBM dalam negeri, membaiknya ekspektasi inflasi serta terjaganya pasokan bahan pangan pokok domestik. Meskipun nilai tukar rupiah agak melemah menjadi Rp 10.950,00/USD pada awal 2009, secara bertahap menguat kembali menjadi Rp 9.400,00/USD pada akhir 2009. Penguatan nilai tukar rupiah didukung oleh neraca pembayaran yang surplus, imbal hasil rupiah yang menarik, premi resiko yang menurun, melemahnya mata uang dollar AS terhadap beberapa mata uang utama dunia, serta meningkatnya keyakinan investor global terhadap kinerja perekonomian Indonesia.

Pada tahun 2009, kebijakan fiskal tetap diarahkan untuk memberi stimulus kepada perekonomian namun dengan terus menjaga ketahanannya. Hal ini dilakukan mengingat dampak terberat dari krisis ekonomi global diperkirakan terjadi pada tahun 2009. Oleh karena itu, kebijakan fiskal yang ditempuh ditujukan untuk menyelamatkan perekonomian nasional dengan memperluas program stimulus ekonomi melalui APBN 2009; melakukan perubahan asumsi dasar untuk memberikan sinyal yang tepat kepada publik; serta melakukan beberapa penyesuaian terhadap besaran pendapatan negara, belanja negara, defisit, dan pembiayaan anggaran.

Arah kebijakan stimulus fiskal yang ditempuh bertujuan untuk: (i)

mempertahankan sekaligus meningkatkan daya beli masyarakat antara lain melalui berbagai insentif perpajakan dan pemberian subsidi, serta bantuan langsung tunai; (ii) mencegah timbulnya PHK secara luas dan meningkatkan daya tahan usaha dalam menghadapi krisis antara lain melalui penurunan berbagai tarif perpajakan dan bea masuk, potongan tarif listrik, subsidi bunga, serta pemberian kredit usaha rakyat; (iii) menangani dampak PHK dan mengurangi tingkat pengangguran dengan meningkatkan belanja infrastruktur padat karya melalui penambahan anggaran untuk infrastruktur; serta (iv) mempercepat laju pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dengan meneruskan reformasi di seluruh kementerian negara/lembaga (K/L).

Dengan langkah-langkah tersebut di atas, pendapatan negara dan hibah mencapai sekitar Rp 866,8 triliun atau 16,3 persen PDB, lebih rendah Rp 118,9 triliun bila dibandingkan dengan sasaran yang ditetapkan dalam APBN 2009, yaitu sebesar Rp 985,7 triliun atau 18,5 persen PDB. Penurunan tersebut terutama didorong oleh penurunan penerimaan dalam negeri, baik berupa penerimaan perpajakan maupun penerimaan negara bukan pajak sebagai dampak dari krisis ekonomi global.

Sementara itu, belanja negara mencapai sekitar Rp 954,0 triliun atau 17,9 persen PDB, yang lebih rendah Rp 83,1 triliun apabila dibandingkan dengan anggaran belanja negara yang ditetapkan dalam APBN 2009 yang besarnya Rp 1.037,1 triliun atau 19,5 persen PDB. Penurunan anggaran belanja tersebut antara lain disebabkan oleh beban belanja subsidi yang menurun menjadi Rp 159,5 triliun atau 3,0 persen PDB dari Rp 166,7 triliun atau 3,1 persen PDB yang ditetapkan dalam APBN 2009. Penurunan subsidi ini disebabkan oleh perubahan asumsi harga minyak yang cukup besar dari US\$80 per barel menjadi US\$61,6 per barel.

Perkembangan penerimaan dan belanja negara di atas, mendorong peningkatan defisit anggaran dalam tahun 2009 menjadi sebesar 1,6 persen PDB, atau meningkat sebesar 0,6 persen PDB jika dibandingkan dengan defisit yang ditetapkan dalam APBN tahun 2009 yang besarnya 1,0 persen PDB. Selanjutnya stok utang pemerintah dapat diturunkan menjadi sebesar 30,0% PDB.

Menjelang akhir tahun 2009, proses pemulihan ekonomi dunia terus menunjukkan peningkatan dan berdampak positif terhadap kinerja sektor eksternal pada keseluruhan tahun 2009. Kondisi Neraca Pembayaran sampai triwulan III tahun 2009 terjaga. Total nilai ekspor sampai triwulan III tahun 2009 mencapai USD 84,1 miliar atau turun 23,4 persen jika dibanding dengan triwulan III tahun 2008. Total nilai impor sampai triwulan III tahun 2009 mencapai USD 91,1 miliar atau menurun 33,3 persen dibanding triwulan III tahun 2008. Secara keseluruhan, neraca transaksi berjalan sampai triwulan III tahun 2009 mengalami surplus sebesar USD 7,4 miliar. Pada triwulan II tahun 2009 arus modal dan finansial mengalami defisit, namun sampai dengan triwulan III tahun 2009 secara keseluruhan arus modal dan finansial surplus sebesar USD 4,7 miliar, surplus ini didorong oleh arus masuk investasi langsung asing sebesar USD 3,8 miliar serta arus masuk investasi portfolio sebesar USD 6,6 miliar,

sedangkan investasi lainnya (neto) masih mengalami defisit sebesar USD 5,6 miliar. Neraca keseluruhan sampai triwulan III tahun 2009 mencapai USD 8,6 miliar dengan cadangan devisa mencapai USD 62,3 miliar atau setara dengan 6,1 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri.

Dengan perkembangan pertumbuhan ekonomi tersebut diatas, dan berbagai kebijakan ketenagakerjaan dan penanggulangan kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka menurun dari 8,39 persen pada tahun Agustus 2008 menjadi 7,87 persen Agustus 2009 dan tingkat kemiskinan menurun dari 15,4 persen di tahun 2008 (Maret) menjadi 14,1 persen pada tahun 2009 (Maret).

5.2 Prospek Ekonomi 2010-2014

5.2.1 Peningkatan Kesejahteraan Rakyat Melalui Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan

Gambaran ekonomi Indonesia tahun 2010-2014 tidak akan terlepas dari pengaruh perkembangan lingkungan eksternal. Setelah mengalami resesi global sejak pertengahan 2008, tanda tanda pemulihan ekonomi dunia telah sudah mulai terlihat sejak akhir 2009. IMF (Oktober 2009) telah melakukan revisi terhadap prospek ekonomi global pada tahun 2009 dari tumbuh negatif -1,4 persen menjadi -1,1 persen; dan pada tahun 2010 diperkirakan lebih baik dari perkiraan awal dari tumbuh 2,5 persen menjadi 3,1 persen. Pemulihan ini terutama disebabkan oleh berhasilnya intervensi pemerintah di berbagai negara yang telah (i) mendorong sisi permintaan dan (ii) mengurangi ketidakpastian dan terjadinya resiko sistemik pada pasar keuangan. Meskipun pemulihan telah terjadi, perekonomian global masih menghadapi tantangan dalam lima tahun ke depan, yaitu: (i) utang negara maju yang meningkat sejalan dengan upaya peningkatan stimulus fiskal; (ii) tingkat pengangguran yang tinggi di Negara-negara maju; (iii) ketidakpastian harga minyak di pasar dunia.

TABEL 2
PERKIRAAN PERTUMBUHAN EKONOMI
2010 - 2014
(Dalam Persen)

	2010	2011	2012	2013	2014	Rata-rata 2010- 2014
Pertumbuhan Ekonomi	5,5-5,6	6,0-6,3	6,4-6,9	6,7-7,4	7,0-7,7	6,3-6,8
Sisi Pengeluaran						
Konsumsi Masyarakat	5,2-5,2	5,2-5,3	5,3-5,4	5,3-5,4	5,3-5,4	5,3-5,4
Konsumsi Pemerintah	10,8-10,9	10,9-11,2	12,9-13,2	10,2-13,5	8,1-9,8	10,6-11,7
Investasi	7,2-7,3	7,9-10,9	8,4-11,5	10,2-12,0	11,7-12,1	9,1-10,8
Ekspor Barang dan Jasa	6,4-6,5	9,7-10,6	11,4-12,0	12,3-13,4	13,5-15,6	10,7-11,6
Impor Barang dan Jasa	9,2-9,3	12,7-15,2	14,3-15,9	15,0-16,5	16,0-17,4	13,4-14,9
Sisi Produksi						
Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Kehutanan, dan Perikanan	3,3-3,4	3,4-3,5	3,5-3,7	3,6-3,8	3,7-3,9	3,6-3,7
Pertambangan dan Penggalian	2,0-2,1	2,1-2,3	2,3-2,4	2,4-2,5	2,5-2,6	2,2-2,4
Industri Pengolahan	4,2-4,3	5,0-5,4	5,7-6,5	6,2-6,8	6,5-7,3	5,5-6,0
Industri Bukan Migas	4,8-4,9	5,6-6,1	6,3-7,0	6,8-7,5	7,1-7,8	6,1-6,7
Listrik, Gas dan Air	13,4-13,5	13,7-13,8	13,8-13,9	13,9-14,0	14,1-14,2	13,8-13,9
Konstruksi	7,1-7,2	8,4-8,5	8,8-9,3	8,9-10,1	9,1-11,1	8,4-9,2
Perdagangan, Hotel, dan Restoran	4,0-4,1	4,2-4,8	4,4-5,2	4,5-6,4	4,6-6,6	4,3-5,4
Pengangkutan dan Telekomunikasi	14,3-14,8	14,5-15,2	14,7-15,4	14,9-15,6	15,1-16,1	14,7-15,4
Keuangan, Real Estat, dan Jasa Perusahaan	6,5-6,6	6,6-6,7	6,8-7,0	6,9-7,0	7,2-7,3	6,8-6,9
Jasa-jasa	6,7-6,9	6,9-7,0	7,0-7,1	7,1-7,2	7,2-7,4	6,9-7,1

Walaupun diperkirakan terjadi pergeseran kekuatan ekonomi global dari barat ke timur (west to east), perekonomian Amerika Serikat dan negara industri maju lainnya masih tetap menjadi penggerak perekonomian dunia dan pasar komoditi ekspor negara berkembang. Perekonomian Asia diperkirakan tetap menjadi kawasan dinamis dengan motor penggerak perekonomian Cina, India dan negara-negara industri di Asia lainnya dan kawasan yang menarik bagi penanaman modal.

Berdasarkan berbagai langkah kebijakan yang dilakukan di berbagai bidang, sebagaimana telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya; pemulihan ekonomi di Asia yang membaik pada triwulan terakhir 2009 serta pemulihan ekonomi dunia pada tahun

2010 yang lebih baik; ketahanan ekonomi nasional yang tetap terjaga dalam menghadapi krisis keuangan dan penurunan ekonomi global; ekspektasi yang baik terhadap kelanjutan pemerintahan lima tahun mendatang, dan perkiraan lingkungan eksternal pada tahun 2010-2014 maka perekonomian dapat dijaga secara berkelanjutan dengan prospek ekonomi makro tahun 2010-2014 sebagai berikut.

Selama kurun waktu 2010-2014 ekonomi Indonesia diperkirakan tumbuh secara bertahap dari 5,5-5,6 persen pada tahun 2010 menjadi 7,0-7,7 persen pada tahun 2014 atau dengan rata-rata 6,3-6,8 persen pertahun selama lima tahun.

Dari sisi pengeluaran, sumber pertumbuhan ekonomi didorong oleh konsumsi masyarakat yang merupakan komponen utama dari permintaan domestik, serta investasi dan ekspor barang dan jasa. Konsumsi masyarakat diproyeksikan pada tingkat pertumbuhan 5,3-5,4 persen per tahun, sedangkan investasi dan ekspor diharapkan akan meningkat secara bertahap mulai tahun 2010 setelah mengalami pertumbuhan negatif. Investasi diperkirakan tumbuh rata-rata 9,1-10,8 persen dan ekspor barang dan jasa meningkat rata-rata 10,7-11,6 persen per tahun.

Konsumsi masyarakat terus didorong dengan meningkatkan daya beli masyarakat melalui upaya mengendalikan inflasi dan menjaga ketersediaan bahan pokok. Upaya untuk mendorong investasi dilakukan dengan peningkatan harmonisasi kebijakan dan penyederhanaan prosedur perijinan investasi; dan peningkatan fasilitas investasi. Ekspor terus dipacu pertumbuhannya dengan berbagai kebijakan, antara lain: peningkatan akses pasar internasional terutama pasar non tradisional; peningkatan kualitas dan diversifikasi produk ekspor; dan peningkatan fasilitas ekspor.

Dari sisi produksi, setelah mengalami pertumbuhan rendah selama 2004-2009, pertumbuhan industri pengolahan non migas akan didorong kembali sebagai penggerak pertumbuhan dengan rata-rata pertumbuhan 6,1-6,7 persen. Upaya mendorong pertumbuhan industri dilakukan dengan kebijakan penumbuhan populasi usaha industri, penguatan struktur industri, dan peningkatan produktivitas usaha industri. Sementara itu sektor pertanian, perikanan, dan kehutanan diperkirakan tumbuh rata-rata 3,5-3,6 persen per tahun, dengan kebijakan antara lain mewujudkan kemandirian pangan, peningkatan daya saing produk pertanian, serta peningkatan pendapatan petani.

Dengan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan ini, kesejahteraan rakyat akan senantiasa bisa ditingkatkan.

5.2.2. Stabilitas Ekonomi yang Kokoh

Dalam jangka menengah, terutama melalui kebijakan Inflation Targetting Framework dan koordinasi kebijakan makro antara Pemerintah, Bank Indonesia dan Pemerintah Daerah, laju inflasi diarahkan untuk menurun secara bertahap dengan besaran sekitar 4 – 6 persen. Perkiraan tersebut didasarkan dengan sasaran tingkat



inflasi yang cukup rendah dan stabil tetapi tetap memperhatikan pertumbuhan ekonomi. Pencapaian sasaran inflasi tersebut didukung oleh relatif stabilnya nilai tukar, yang dimungkinkan dengan perkiraan masuknya dana investasi luar negeri (capital inflow), baik investasi di sektor keuangan (pasar modal) maupun di sektor riil, akibat meningkatnya iklim usaha dan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang terjaga.

Terkendalinya laju inflasi memberi dorongan bagi penurunan tingkat suku bunga perbankan, yang juga dipengaruhi oleh tingkat risiko dunia usaha. Meskipun tingkat suku bunga perbankan domestik juga akan dipengaruhi oleh peningkatan suku bunga utama internasional pada masa mendatang namun, dalam jangka menengah diharapkan akan terus menurun secara bertahap sehingga dapat mendorong kegiatan ekonomi di sektor riil, baik kegiatan investasi maupun produksi.

Di sisi pengelolaan keuangan negara, ketahanan fiskal yang membaik harus terus dipertahankan. Ketahanan fiskal harus terus diperkuat demi mendukung pencapaian stabilitas ekonomi. Di sisi penerimaan negara, dengan dilanjutkannya berbagai upaya untuk peningkatan penerimaan pajak diharapkan penerimaan pajak meningkat rata-rata sebesar 16,8 persen tiap tahunnya selama periode 2010-2014. Di sisi belanja negara, terjadi peningkatan alokasi anggaran untuk transfer ke daerah rata-rata sebesar 14,0 persen. Di samping itu, selama periode 2010-2014 anggaran belanja pegawai diperkirakan meningkat, seiring dengan upaya reformasi birokrasi yang terus dilakukan pemerintah.

Terkait dengan upaya mengatasi ancaman krisis ekonomi, defisit APBN 2009 masih cukup tinggi hingga mencapai 1,6 persen PDB seiring dengan pemberian stimulus fiskal. Namun dengan kebijakan yang terus berlanjut, seperti peningkatan pendapatan dan optimalisasi belanja negara, serta pulihnya kondisi perekonomian, selama lima tahun ke depan defisit APBN diperkirakan mampu turun menjadi sekitar 1,2 persen PDB.

Sementara itu untuk pembiayaan defisit, strategi diarahkan dalam rangka pencapaian 3 sasaran utama yaitu: (a) penurunan rasio stok utang terhadap PDB; (b) penggunaan utang secara selektif; (c) optimalisasi pemanfaatan hibah dan utang. Peningkatan pengelolaan pinjaman pemerintah diarahkan untuk menurunkan stok pinjaman luar negeri, tidak saja relatif terhadap PDB, tetapi juga secara absolut. Sementara itu, untuk pinjaman dalam negeri, terutama melalui penerbitan surat berharga negara, diupayakan tetap adanya ruang gerak yang cukup pada sektor swasta. Dengan demikian, rasio stok utang terhadap PDB diperkirakan dapat diturunkan mencapai sekitar 24 persen pada tahun 2014.

Perkiraan neraca pembayaran didasarkan atas dua asumsi pokok, yaitu perkembangan ekonomi dunia dan perkembangan ekonomi makro di dalam negeri. Asumsi perkembangan ekonomi dunia mencakup laju pertumbuhan ekonomi, terutama negara maju, tingkat inflasi dunia, tingkat suku bunga, serta nilai paritas antara valuta

negara industri utama. Di dalam negeri, perkiraan neraca pembayaran sangat terkait dengan sasaran laju pertumbuhan dan pola pertumbuhan ekonomi, perkiraan pertumbuhan investasi, serta perkiraan sumber pembiayaan investasi, baik dari dalam maupun luar negeri.

Walaupun persaingan di pasar internasional semakin ketat, dengan perkiraan membaiknya perkembangan ekonomi dunia pada tahun 2010—setelah mengalami krisis keuangan global sejak pertengahan 2008—dan didorong oleh pemanfaatan peningkatan daya saing serta upaya-upaya untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi kegiatan ekspor, maka nilai ekspor nonmigas dalam periode 2010-2014 diperkirakan meningkat bertahap. Setelah mengalami pertumbuhan negatif di tahun 2009, ekspor non migas pada tahun 2010 diperkirakan tumbuh 7-8 persen hingga mencapai 14,5-16,5 persen pada tahun 2014.

Dari sisi impor, permintaan domestik yang meningkat akan mendorong kembali kebutuhan impor non migas dari 8-9 persen pada tahun 2010 menjadi 18-19 persen pada tahun 2014. Dengan defisit jasa-jasa yang diperkirakan tetap tinggi pada tahun 2010 hingga tahun 2014, surplus neraca transaksi berjalan diperkirakan menurun hingga tahun 2014.

Investasi asing langsung (foreign direct investment) neto diperkirakan terus meningkat dalam kurun waktu 2010—2014 sedangkan arus modal asing dalam bentuk portfolio diperkirakan tetap terjaga. Dengan perkembangan tersebut, cadangan devisa diperkirakan meningkat menjadi sekitar USD 100 miliar pada tahun 2014.

5.2.3. Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berkeadilan

Target pertumbuhan ekonomi tersebut akan disertai dengan berbagai kebijakan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan antara lain kebijakan dalam ketenagakerjaan, pemberdayaan usaha kecil dan menengah, dan penanggulangan kemiskinan. Dengan tambahan angkatan kerja baru rata-rata sebesar 2 juta orang per tahun, pengangguran terbuka diperkirakan dapat diturunkan menjadi 5 – 6 persen pada tahun 2014. Sejalan dengan itu, jumlah penduduk miskin diperkirakan terus berkurang dari 14,1 persen (Maret 2009) hingga mencapai 8 – 10 persen di tahun 2014.

Pembangunan nasional yang dilakukan di berbagai bidang melalui berbagai prioritas sebagaimana diuraikan di atas, masih menyisakan berbagai kesenjangan yang menjadi tantangan yang perlu diselesaikan. Hal tersebut antara lain tercermin pada permasalahan sebagai berikut. Pertama, tingkat kemiskinan antarprovinsi yang masih cukup tinggi perbedaannya. Sebagai contoh DKI Jakarta memiliki tingkat kemiskinan sebesar 3,6 persen, sementara di provinsi Papua tingkat kemiskinan pada tahun 2009 mencapai 37,5 persen. Kedua, tingkat pemenuhan kebutuhan dan layanan dasar antarkelompok masyarakat juga masih memiliki perbedaan yang cukup besar. Kelompok masyarakat dengan pendapatan 40 persen terendah masih mengkonsumsi kalori di bawah 2.100 kkal/kapita/hari, yang merupakan persyaratan minimum



kecukupan kalori. Layanan kesehatan melalui Puskesmas dan dokter juga masih rendah. Demikian pula untuk akses terhadap air bersih. Ketiga, penyerapan tenaga kerja baru sebagian besar adalah berupa pekerja informal, yang biasanya tergantung pada usaha kecil dan mikro yang memiliki keterbatasan terhadap akses sumber daya produktif untuk mengembangkan usahanya. Keempat, kesetaraan gender di berbagai bidang masih terbatas. Sementara peran perempuan dalam peningkatan kualitas keluarga, di dalam kegiatan ekonomi serta berbagai bidang lainnya sangat besar.

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, untuk mewujudkan pembangunan yang inklusif termasuk menyertakan semua kelompok masyarakat dan golongan serta masyarakat yang berada di wilayah-wilayah yang terpencil dan terisolasi, dilakukan kebijakan dan langkah-langkah sebagai berikut.

Pertama, meningkatkan efektivitas kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan sebagaimana diuraikan di dalam Prioritas Penanggulangan Kemiskinan agar dapat melayani dan menjangkau masyarakat miskin, yang selama ini memiliki tingkat pendapatan yang rendah serta keterbatasan akses terhadap kebutuhan dasar. Arah kebijakan yang tercermin dalam berbagai fokus di dalam prioritas tersebut merupakan langkah keberpihakan terhadap masyarakat yang masih memiliki pendapatan di bawah garis kemiskinan. Program-program bantuan sosial berbasis keluarga dilakukan untuk membantu kelompok masyarakat ini, agar mereka tetap terpenuhi kebutuhan dasarnya, sehingga pemenuhan kebutuhan dan layanan dasar yang masih rendah dapat ditingkatkan dan kesenjangan akses antar kelompok pendapatan akan dapat dikurangi. Selanjutnya, program bantuan sosial ini juga akan lebih memperhatikan kelompok masyarakat penyandang cacat, lansia terutama yang berasal dari keluarga miskin, anak terlantar, serta masyarakat terpinggirkan, agar mereka mendapatkan akses terhadap kebutuhan dan layanan dasar serta sumber daya produktif untuk meningkatkan kesejahteraannya. Sementara itu, program PNPM Mandiri dikhususkan untuk membantu masyarakat bersama penduduk miskin agar mereka berdaya dan akhirnya mampu berpartisipasi aktif dalam mengentaskan dirinya dari kemiskinan dan pada gilirannya mampu berpartisipasi dalam pembangunan di wilayahnya secara lebih luas. Selanjutnya, program dalam cluster Pemberdayaan Usaha Kecil dan Mikro juga diarahkan untuk dapat membantu pekerja informal, sehingga mereka memiliki akses yang sama untuk berusaha dan meningkatkan pendapatan untuk memperbaiki kesejahteraannya. Secara keseluruhan program-program dalam tiga cluster penanggulangan kemiskinan ditingkatkan efektivitasnya untuk dapat meningkatkan jangkauan dan pemenuhan kebutuhan dan layanan dasar bagi masyarakat miskin, penyandang cacat, lansia dan terpinggirkan sehingga proses pembangunan dapat mengikutsertakan seluruh komponen bangsa dan hasil pembangunan dapat dinikmati semua lapisan masyarakat dan pada akhirnya dapat secara aktif berpartisipasi dalam pembangunan.

Kedua, peran perempuan dalam peningkatan kesejahteraan keluarga sangat besar terutama dalam keluarga miskin, baik melalui peningkatan kegiatan ekonomi

maupun dalam meningkatkan pemenuhan kebutuhan dasar. Namun demikian, peran mereka dalam pengambilan keputusan di dalam keluarga masih terbatas. Keterbatasan terjadi karena minimnya wawasan dan kemampuan mereka. Hambatan lain adalah karena wanita belum mendapatkan tempat dan kesempatan yang setara dengan laki-laki. Bahkan banyak wanita yang menjadi korban tindak kekerasan dalam rumah tangga. Demikian pula, anak yang seharusnya menjadi generasi muda berkualitas agar dapat menjadi pemutus rantai kemiskinan antar generasi belum mendapatkan perlindungan dan kesempatan di masa mudanya sebagai fondasi untuk membangun masa depannya. Sehubungan dengan itu, perhatian khusus melalui kebijakan dan program yang berpihak kepada perempuan dan anak terus dilakukan, terutama pembinaan anak-anak terlantar yang tidak memiliki keluarga dan orang tua yang dapat membantu mereka untuk membangun masa depan demi peningkatan kualitas kesejahteraannya. Kebijakan dan program untuk memberi perhatian pada perempuan dan anak dilakukan melalui kebijakan dan program dalam Prioritas Nasional lainnya Bidang Kesejahteraan Rakyat.

Ketiga, sebagian besar masyarakat miskin berada di daerah perdesaan yang memiliki keterbatasan infrastruktur, dan sebagian dari mereka berada di daerah-daerah yang terpencil dan terisolasi, termasuk daerah perbatasan yang sebagian besar jauh dari ibu kota wilayah kabupaten dan kota lainnya. Untuk itu, pembangunan infrastruktur perdesaan merupakan program penting yang akan dilakukan untuk memberi kesempatan sama kepada masyarakat di daerah perdesaan, dan daerah terpencil dan terisolasi. Berkaitan dengan itu, pembangunan daerah perbatasan memerlukan perhatian khusus, sehingga masyarakat di daerah perbatasan akan memiliki kesempatan yang sama dengan masyarakat di wilayah lainnya untuk menikmati hasil pembangunan dan berpartisipasi serta berkontribusi dalam pembangunan nasional. Kebijakan dan program yang diarahkan untuk ini semua dilakukan melalui Prioritas Pembangunan Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar dan Pasca Konflik.

Berbagai kebijakan dan program untuk mengikutsertakan seluruh lapisan dan berbagai kelompok masyarakat yang tersebar di berbagai wilayah, akan didukung dengan penyempurnaan berbagai mekanisme keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Saat ini mekanisme keuangan ke daerah dilakukan melalui DAU, DAK, dan Dana Bagi Hasil. Mekanisme keuangan ini terus disempurnakan dan dilengkapi dengan berbagai instrumen yang akan mendukung proses pembangunan yang sudah lebih terdesentralisasi ke daerah, serta meningkatkan kualitas pendanaan pembangunan nasional.

Pembangunan yang inklusif dan berkeadilan juga dicerminkan dari segi proses perumusan kebijakan dan implementasinya, yaitu harus melibatkan para pemangku kepentingan untuk dapat berperan aktif dan bekerjasama dengan membangun konsensus pemihakan kepada masyarakat yang masih tertinggal. Kebijakan yang afirmatif harus dijalankan untuk mengatasi kesenjangan, ketertinggalan, maupun kemiskinan yang masih mewarnai kehidupan sebagian besar bangsa Indonesia. Kebijakan yang afirmatif akan berhasil apabila didukung dengan koordinasi dan proses

konsultasi yang efektif antar para pemangku kepentingan.

5.2.4 Kebutuhan Investasi dan Kebijakan Pendanaan Pembangunan Nasional serta Pemanfaatannya

Dalam rangka mencapai sasaran pembangunan, kebijakan pendanaan investasi diarahkan untuk menjamin ketersediaan dan mengoptimalkan pendanaan pembangunan menuju kemandirian pendanaan pembangunan. Dalam kaitan itu, strategi utama pendanaan pembangunan adalah (i) optimalisasi sumber dan skema pendanaan pembangunan baik yang telah ada maupun yang akan dikembangkan, dan (ii) peningkatan kualitas pemanfaatan sumber dan skema pendanaan pembangunan.

Untuk mencapai sasaran pertumbuhan ekonomi rata-rata 6,3–6,8 persen pertahun dibutuhkan total investasi kumulatif selama lima tahun sebesar Rp 11.913,2-Rp 12.462,6 triliun. Dari total kebutuhan investasi tersebut, sekitar 18 persen pada tahun 2014 diharapkan dapat dipenuhi oleh pemerintah. Pembiayaan belanja pemerintah diperoleh dari penerimaan pajak dan penerimaan bukan pajak, dapat berasal dari hibah, pembiayaan luar negeri, dan pembiayaan dalam negeri. Sisa kebutuhan investasi dapat dipenuhi oleh dunia usaha dan masyarakat yang berasal dari perbankan, lembaga keuangan non bank, pasar modal (saham dan obligasi), dana luar negeri, laba ditahan, dan lainnya. Peningkatan proporsi pendanaan investasi dunia usaha diharapkan terutama terjadi pada komponen PMA dan PMDN sejalan dengan penciptaan iklim usaha yang kondusif, serta peningkatan pasar modal sejalan perbaikan regulasi, dan penguatan manajemen pasar modal, serta meningkatnya tata kelola dan kinerja perusahaan.

Dalam rangka peningkatan penerimaan negara, pemerintah terus melakukan pengembangan dan penyempurnaan kebijakan perpajakan dan penerimaan bukan pajak dengan tetap menjaga iklim investasi yang kondusif. Sementara itu, untuk meningkatkan efektivitas belanja negara dilakukan beberapa upaya sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas belanja melalui pemantapan pelaksanaan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM) atau *Medium-Term Expenditure Framework* (MTEF) dan pemantapan pelaksanaan anggaran berbasis kinerja (*performance based budgeting*), antara lain melalui restrukturisasi program dan kegiatan, serta penyusunan indikator kinerja yang tepat dan terukur.
2. Meningkatkan dan memperkuat keterkaitan perencanaan dengan penganggaran Pemerintah Pusat melalui penyempurnaan penyusunan RPJMN, Renstra, RKP, Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga, dan lainnya. Demikian pula Pemerintah Daerah untuk RPJMD, Rencana Kerja dan Anggaran Pemerintah Daerah, dan lainnya.
3. Menyusun alokasi belanja yang lebih tepat sasaran dan menempatkan prioritas pendanaan pada kegiatan-kegiatan yang dapat melipatgandakan kegiatan

perekonomian domestik dan mampu menciptakan lapangan kerja yang tinggi serta mendukung peningkatan kualitas layanan.

4. Memperkuat pemantauan dan evaluasi dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan penganggaran.
5. Menyempurnakan mekanisme pengadministrasian dan pencairan anggaran agar lebih cepat, dan akuntabel.

Sumber pembiayaan luar negeri, baik berupa hibah maupun pinjaman luar negeri (PHLN), terus diupayakan dengan tetap mengutamakan kedaulatan dan kepentingan nasional serta meningkatkan efektivitas pemanfaatannya sesuai prioritas pembangunan nasional. Pemanfaatan PHLN harus dilihat tidak hanya dari sisi pendanaan tetapi juga sebagai sarana untuk bertukar informasi dan pembelajaran dalam rangka memperkuat dan menyempurnakan sistem perencanaan, anggaran, pengadaan, pemantauan dan evaluasi nasional serta kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia.

Sumber pendanaan melalui hibah luar negeri dapat berasal dari mitra pembangunan internasional, baik negara maupun lembaga/badan internasional. Walaupun hibah sebagai penerimaan negara mempunyai proporsi yang kecil, namun sifat hibah yang tidak memiliki resiko pengembalian merupakan sumber pendanaan yang potensial untuk dimanfaatkan. Dalam upaya optimalisasi penggunaan hibah, pemerintah akan terus meningkatkan kapasitas lembaga penerima hibah dan menyempurnakan peraturan pelaksanaan mengenai tata kelola hibah pemerintah yang lebih kondusif dan fleksibel namun tetap akuntabel disesuaikan dengan karakteristik hibah.

Sumber pendanaan dari pinjaman luar negeri dapat berupa pinjaman program maupun pinjaman proyek yang berasal dari lembaga multilateral, bilateral dan lembaga keuangan komersial. Sehubungan dengan meningkatnya peringkat Indonesia sebagai negara Lower Middle Income Country (LMIC) maka sumber pinjaman yang sangat murah dari lembaga keuangan multilateral sudah tidak dapat diperoleh lagi. Karena itu, pengelolaan pinjaman luar negeri semakin diperkuat dan pemanfaatannya semakin dioptimalkan.

Untuk mengurangi beban utang pemerintah, maka rasio stok utang pemerintah, termasuk utang luar negeri, terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) secara konsisten akan diturunkan hingga mencapai sekitar 24% pada akhir tahun 2014 dengan tetap menjaga target negative net transfer. Pengelolaan utang Pemerintah akan terus ditingkatkan, antara lain melalui peningkatan efektivitas pengelolaan portofolio, diversifikasi sumber-sumber utang, pengembangan skema pendanaan utang yang lebih aman dan pengelolaan resiko utang pemerintah.

Selanjutnya, dalam meningkatkan kualitas pemanfaatan pinjaman dan hibah luar



negeri, dilakukan upaya (i) penyempurnaan peraturan-peraturan perundangan mengenai perencanaan dan pengelolaan PHLN pemerintah (Peraturan Pemerintah No. 2/2006 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman dan/atau Penerimaan Hibah serta Penerusan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri dan Peraturan Menteri Negara PPN No. 05/2006 tentang Tata Cara Perencanaan dan Pengajuan Usulan Serta Penilaian Kegiatan yang Dibiayai dari Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri), (ii) peningkatan kualitas perencanaan dan kapasitas pelaksanaan proyek antara lain melalui penegakan aturan kesiapan proyek, penajaman fokus pemanfaatan PHLN yang lebih selektif untuk membiayai atau mendukung program/kegiatan prioritas nasional, (iii) peningkatan penggunaan sistem nasional (alignment) dan harmonisasi kegiatan mitra-mitra pembangunan, (iv) penguatan kualitas pemantauan dan evaluasi. Pemerintah terus meningkatkan efektifitas pemanfaatan pinjaman dan hibah luar negeri (PHLN) bersama-sama mitra pembangunan dengan melaksanakan secara konsisten agenda Paris Declaration, yang telah dijabarkan lebih lanjut ke dalam Jakarta Commitment.

Pembiayaan dalam negeri Pemerintah terdiri dari pembiayaan perbankan dan bukan perbankan. Pembiayaan dalam negeri Pemerintah yang peranannya sangat penting adalah pembiayaan bukan perbankan, terutama Surat Berharga Negara (SBN) dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan pinjaman dalam negeri. SBN/SBSN dijual secara luas kepada lembaga keuangan maupun masyarakat. Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan portofolio SBN/SBSN terus dilakukan pengembangan instrumen baru, perkuatan infrastruktur dan koordinasi pengelolaannya.

Sedangkan pinjaman dalam negeri diperoleh melalui pembiayaan perbankan BUMN, perbankan swasta dalam negeri dan Pemerintah Daerah. Pinjaman dalam negeri Pemerintah dijaga supaya tidak mengganggu penyerapan kredit sektor swasta dan dilakukan terutama untuk mengurangi ketergantungan terhadap pinjaman komersial luar negeri. Dalam upaya tersebut, kebijakan pemerintah diprioritaskan untuk penyempurnaan peraturan-peraturan perundangan dan penguatan kapasitas lembaga yang terkait dengan pengadaan pinjaman dalam negeri. Hal ini diarahkan untuk memperkuat mekanisme koordinasi kelembagaan dalam pemanfaatan pinjaman, baik dalam hal perencanaan, pelaksanaan, maupun pemantauan dan evaluasi.

Perbankan sebagai lembaga intermediasi pendanaan mempunyai peranan yang sangat penting dalam penyediaan sumber dana investasi yang berasal dari tabungan masyarakat. Skema pendanaan dari perbankan dapat bersifat konvensional maupun syariah. Di samping perbankan, dana masyarakat dapat disalurkan melalui lembaga keuangan bukan bank antara lain terdiri dari lembaga pembiayaan termasuk lembaga pembiayaan infrastruktur dan lembaga pembiayaan ekspor, lembaga asuransi, lembaga dana pensiun, lembaga pegadaian, lembaga pasar modal dan sebagainya. Potensi lembaga-lembaga keuangan ini perlu lebih diarahkan pada pembiayaan di sektor riil untuk mendorong investasi. Untuk itu terus dilakukan upaya penyempurnaan peraturan dan kebijakan untuk mendukung peran perbankan, non-perbankan, dan pasar modal

sebagai sumber pendanaan jangka menengah dan jangka panjang.

Selain berperan sebagai penyedia sumber pembiayaan pembangunan nasional, PMDN/PMA juga berperan sebagai aktor/pelaku penting pembangunan nasional. Untuk meningkatkan PMDN/PMA, strategi utamanya adalah penyempurnaan kebijakan untuk mencapai iklim investasi yang lebih kondusif serta penyediaan infrastuktur yang andal dan memadai.

Potensi untuk meningkatkan sumber pendanaan pembangunan nasional juga dapat dilakukan dengan mendorong dan mengembangkan skema pendanaan pembangunan yang melibatkan peran dan kontribusi pemerintah, dunia usaha dan masyarakat. Beberapa skema pendanaan yang dapat dimanfaatkan antara lain: (i) Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS)/Public Private Partnership (PPP), (ii) Corporate Social Responsibility (CSR), dan (iii) Donasi/Zakat.

Kemampuan pihak swasta dalam menurunkan biaya, memperpendek waktu penyediaan, serta mengelola manajemen konstruksi dan fasilitas secara lebih efisien menyebabkan KPS dapat menawarkan nilai uang (*value for money*) dibandingkan dengan pembangunan fasilitas yang sama yang dikelola oleh pemerintah. Dalam upaya meningkatkan pemanfaatan skema pendanaan melalui Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS), dilakukan dua hal utama yaitu optimalisasi skema KPS dan peningkatan kualitas pemanfaatan skema KPS.

Upaya optimalisasi skema KPS dilakukan melalui hal-hal berikut:

1. Pengembangan, penyempurnaan dan harmonisasi berbagai kebijakan dan peraturan sektoral maupun regional, untuk memfasilitasi dan memperlancar pembentukan KPS terutama penyempurnaan Peraturan Presiden 67/2005 dan peraturan penyediaan lahan untuk pembangunan prasarana publik.
2. Pengembangan peraturan perundang-undangan untuk memperluas bidang prioritas KPS selain di bidang infrastruktur.

Upaya peningkatan efektivitas pemanfaatan skema KPS dilakukan melalui hal-hal berikut:

1. Penyusunan buku kerjasama pemerintah dan swasta (*PPP book*) yang berisi tentang daftar proyek pemerintah yang dapat dikerjasamakan dengan swasta setiap awal tahun, sesuai dengan siklus rencana kerja pemerintah. Sesuai dengan amanat Inpres 5/2008, *PPP Book* disusun dan diterbitkan sebagai upaya menciptakan mekanisme penyiapan proyek yang lebih terintegrasi dengan siklus anggaran pemerintah, transparan dan akuntabel. Dalam upaya optimalisasi partisipasi swasta dalam pembangunan, rencana penyiapan proyek pemerintah yang dikerjasamakan dengan swasta harus terintegrasi dengan rencana kerja pemerintah agar kemudian dapat diimplementasikan oleh kementerian/lembaga dan satuan kerja perangkat daerah.



2. Penguatan peran kelembagaan KPS untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan pelaksanaan KPS dalam menyusun strategi perencanaan dan prioritas sektor yang akan dikerjasamakan.

Pelaksanaan CSR oleh badan usaha yang beroperasi di Indonesia telah diamanatkan dalam UU No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. CSR selanjutnya lebih diarahkan kepada peningkatan keselarasan kegiatannya dengan program pemerintah dalam mendukung pembangunan nasional, antara lain termasuk pencapaian Millenium Development Goals (MDGs) serta penanganan perubahan iklim. Mengingat potensi CSR cukup besar dalam menunjang pencapaian tujuan pembangunan, maka harus dilakukan upaya harmonisasi kebijakan lembaga/perusahaan dengan pemerintah dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kegiatan.

Skema pendanaan pembangunan lain yang semakin berkembang adalah yang terkait dengan keagamaan, seperti zakat. Beberapa badan pengelola zakat sudah mulai mengembangkan sistem pengelolaan zakat secara lebih profesional dan juga berpotensi untuk mendukung program pemerintah. Untuk itu, sumber dana ini terus didorong agar semakin meningkat, antara lain melalui penguatan lembaga dan manajemen pengelolaan dana berbasis keagamaan serta pemanfaatannya selaras dengan pembangunan nasional.

Selain sumber dan skema pendanaan di atas, terdapat skema global yang berpotensi sebagai sumber pendanaan pembangunan nasional, seperti: Carbon Trade, Clean Development Mechanism (CDM), Copenhagen Green Climate Fund, dan lain sebagainya. Dalam upaya pemanfaatan sumber pendanaan tersebut, dilakukan pengembangan dan penguatan kebijakan dan kapasitas kelembagaan yang dapat mendukung pemanfaatan dana-dana tersebut.

TABEL 3
KERANGKA EKONOMI MAKRO
2010-2014

	Proyeksi Jangka Menengah				
	2010	2011	2012	2013	2014
Pertumbuhan Ekonomi	5,5 - 5,6	6,0 - 6,3	6,4 - 6,9	6,7 - 7,4	7,0 - 7,7
Pertumbuhan PDB Sisi Pengeluaran (%)					
Konsumsi					
Masyarakat	5,2 - 5,3	5,2 - 5,3	5,3 - 5,4	5,3-5,4	5,3 - 5,4
Pemerintah	10,8 - 10,9	10,9 - 11,2	12,9 - 13,2	10,2 - 13,5	8,1 - 9,8
Investasi	7,2 - 7,3	7,9 - 10,9	8,4 - 11,5	10,2 - 12,0	11,7 - 12,1
Ekspor	6,4 - 6,5	9,7 - 10,9	11,4 - 12,0	12,3 - 13,4	13,5 - 15,6
Impor	9,2 - 9,3	12,7 - 15,2	14,3 - 15,9	15,0 - 16,5	16,0 - 17,4
Pertumbuhan PDB Sisi Produksi (%)					
Pertanian	3,3 - 3,4	3,4 - 3,5	3,5 - 3,7	3,6 - 3,8	3,7 - 3,9
Industri Pengolahan	4,2 - 4,3	5,0 - 5,4	5,7 - 6,5	6,2 - 6,8	6,5 - 7,3
Nonmigas	4,8 - 4,9	5,6 - 6,1	6,3 - 7,0	6,8 - 7,5	7,1 - 7,8
Lainnya	6,5 - 6,7	7,0 - 7,3	7,3 - 7,7	7,5 - 8,4	7,8 - 8,6
PDB per Kapita					
(US\$)	2.555	2.883	3.170	3.445	3.811
Riil Harga Konstan 2000 (Ribu Rp)	9.785	10.255	10.790	11.389	12.058
Stabilitas Ekonomi					
Laju Inflasi, Indeks Harga Konsumen (%)	4,0 - 6,0	4,0 - 6,0	4,0 - 6,0	3,5 - 5,5	3,5 - 5,5
Nilai Tukar Nominal (Rp/US\$)	9.750 - 10.250	9.250 - 9.750	9.250 - 9.750	9.250 - 9.850	9.250 - 9.850
Suku Bunga SBI 3 bln (%)	6,0 - 7,5	6,0 - 7,5	6,0 - 7,5	5,5 - 6,5	5,5 - 6,5
Neraca Pembayaran					
Pertumbuhan Ekspor Nonmigas (%)	7,0 - 8,0	11,0 - 12,0	12,5 - 13,5	13,5 - 14,5	14,5 - 16,5
Pertumbuhan Impor Nonmigas (%)	8,0 - 9,0	14,0 - 15,6	16,0 - 17,5	17,0 - 18,3	18,0 - 19,0
Cadangan Devisa (US\$ miliar)	74,7 - 75,6	82,4 - 84,1	89,6 - 92,0	96,1 - 99,2	101,4 - 105,5
Keuangan Negara *)					
Surplus/Defisit APBN/PDB (%)	-1,6	-1,9	-1,6	-1,4	-1,2
Penerimaan Pajak/PDB (%)	12,4	12,6	13,0	13,6	14,2
Stok Utang Pemerintah/PDB (%)	29	28	27	25	24
Pengangguran dan Kemiskinan					
Tingkat Pengangguran (%)	7,6	7,3 - 7,4	6,7 - 7,0	6,0 - 6,6	5,0 - 6,0
Tingkat Kemiskinan (%)	12,0 - 13,5	11,5 - 12,5	10,5 - 11,5	9,5 - 10,5	8,0 - 10,0

*) Angka tahun 2010 adalah angka APBN 2010 yang akan disesuaikan pada saat APBN-P 2010

ditetapkan

5.2.5 Pendanaan melalui Transfer ke Daerah

Pendanaan pembangunan melalui transfer ke Daerah merupakan salah satu instrumen utama dalam rangka pelaksanaan desentralisasi fiskal. Dana transfer ke daerah terdiri dari Dana Perimbangan, Dana Otonomi Khusus (Otsus) dan Dana Penyesuaian. Seiring dengan pelaksanaan desentralisasi atau penyerahan kewenangan atas sebagian urusan pemerintahan ke daerah yang dimulai sejak tahun 2001, alokasi transfer ke daerah terus meningkat. Pada tahun 2001, alokasi transfer ke daerah baru mencakup Dana Perimbangan, tetapi sejak tahun 2002, juga mencakup Dana Otsus dan Dana Penyesuaian.

Dalam periode 2010-2014 akan dilakukan restrukturisasi dan penataan instrumen pendanaan melalui transfer ke daerah serta memperjelas kedudukan Dana Perimbangan dalam kerangka perimbangan keuangan pusat dan daerah yang lebih selaras dengan perimbangan kewenangan Pusat dan Daerah. Sehubungan dengan itu, pengalokasian transfer ke daerah dalam RPJMN 2010-2014 diarahkan untuk:

1. meningkatkan kapasitas fiskal daerah dan mengurangi kesenjangan fiskal antara pusat dan daerah dan antar daerah;
2. menyelaraskan besaran kebutuhan pendanaan di daerah sesuai dengan pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerah dan mengurangi kesenjangan pelayanan publik antar daerah;
4. meningkatkan daya saing daerah;
5. mendukung kesinambungan fiskal nasional dalam kerangka kebijakan ekonomi makro;
6. meningkatkan kemampuan daerah dalam menggali potensi ekonomi daerah;
7. meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya nasional;
8. meningkatkan sinkronisasi antara rencana pembangunan nasional dengan rencana pembangunan daerah.

Pengelolaan transfer ke daerah senantiasa didorong untuk memenuhi pelaksanaan tata kelola keuangan yang baik, yaitu tepat sasaran, tepat waktu, efisien, adil, transparan, akuntabel, serta memiliki kinerja terukur.

Dana Perimbangan

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana perimbangan yang terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK), merupakan pendanaan pelaksanaan desentralisasi yang alokasinya tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain karena masing-masing jenis dana perimbangan tersebut saling mengisi dan melengkapi.

Arah Kebijakan Pengalokasian Dana Bagi Hasil

Dana Bagi Hasil (DBH) terdiri dari DBH pajak dan DBH sumber daya alam (SDA) merupakan hak daerah atas pengelolaan sumber-sumber penerimaan negara yang dihasilkan masing-masing daerah, yang besarnya memperhitungkan potensi daerah penghasil (*by origin*). DBH merupakan bagian dari dana perimbangan yang dialokasikan untuk mengatasi masalah ketimpangan vertikal antara Pemerintah Pusat dan Daerah dalam hal kemampuan keuangan (kapasitas fiskal). Sumber-sumber penerimaan yang dibagihhasilkan yaitu penerimaan dari pajak (pajak penghasilan, pajak bumi dan bangunan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, dan cukai hasil tembakau) dan dana bagi hasil sumberdaya alam (minyak bumi, gas alam, pertambangan umum, kehutanan dan perikanan). Penggunaan DBH tersebut telah menjadi kewenangan pemerintah daerah sesuai dengan kebutuhan daerah dalam penyelenggaraan pembangunan di daerah penerima kecuali untuk dana bagi hasil cukai tembakau, yang penggunaannya telah ditentukan oleh pemerintah pusat.

Arah kebijakan pengalokasian DBH dalam RPJMN 2010-2014 adalah:

1. Meningkatkan akurasi data melalui koordinasi dengan institusi pengelola Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);
2. Menyempurnakan proses penghitungan dan penetapan alokasi DBH secara lebih transparan dan akuntabel;
3. Menyempurnakan sistem penyaluran DBH sehingga alokasi DBH ke daerah penghasil lebih tepat waktu dan tepat jumlah.
4. Mendorong daerah penghasil SDA, terutama SDA tidak terbarukan, untuk meningkatkan upaya konservasi dan penanganan terhadap dampak lingkungan hidup pascakegiatan eksplorasi.



Arah Kebijakan Pengalokasian Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Jumlah keseluruhan DAU ditetapkan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku sekurang-kurangnya 26 persen dari pendapatan dalam negeri netto yang ditetapkan dalam APBN.

DAU merupakan transfer pemerintah Pusat kepada Daerah dan bersifat *Block Grant* yang berarti daerah diberi keleluasaan dalam penggunaannya sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. DAU terdiri dari DAU untuk daerah provinsi dan DAU untuk daerah kabupaten/kota. Pengalokasian DAU kepada masing-masing daerah menggunakan formula dan mekanisme sebagaimana diatur dalam UU Nomor 33 Tahun 2004 dan PP Nomor 55 Tahun 2005. Alokasi DAU untuk daerah otonom baru (DOB) dilakukan dengan mekanisme sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Sasaran yang ingin dicapai dalam kurun waktu 2010-2014 adalah meningkatnya efektivitas dan akuntabilitas DAU sebagai instrumen untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah dan mengurangi ketimpangan fiskal antar daerah, dalam rangka menjamin terselenggaranya pemerintahan dan pembangunan daerah yang efektif serta pelayanan publik yang lebih merata di daerah sesuai dengan standar pelayanan minimal (SPM).

Untuk mencapai sasaran tersebut, arah kebijakan pengalokasian DAU dalam RPJMN 2010-2014 adalah:

1. meningkatkan proporsi DAU terhadap Pendapatan Dalam Negeri (PDN) neto secara bertahap;
2. menyempurnakan formula alokasi DAU antara lain dengan meniadakan penggunaan variabel belanja pegawai, menambahkan variabel untuk memberikan insentif kepada daerah-daerah yang berprestasi dalam bidang ekonomi dan kesejahteraan sosial, dan/atau kompensasi kepada daerah-daerah yang sebagian besar wilayahnya merupakan kawasan lindung;
3. menyempurnakan penilaian kebutuhan fiskal dalam formula alokasi DAU berdasarkan perhitungan belanja untuk memenuhi SPM sesuai dengan Analisis Standar Belanja (ASB);

Arah Kebijakan Pengalokasian Dana Alokasi Khusus

Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai

kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

DAK sebagai salah satu instrumen Dana Perimbangan terus mengalami perkembangan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun, baik dari sisi besaran alokasi, cakupan bidang DAK, maupun jumlah daerah yang memperoleh alokasi DAK. Beberapa kendala dan permasalahan dalam pengelolaan DAK selama ini meliputi : 1) masih adanya kekurangtepatan pemahaman tentang konsep DAK baik di pusat maupun di daerah; 2) masih relatif kecilnya pagu nasional DAK dibandingkan dengan kebutuhan; 3) batasan penggunaan DAK sesuai peraturan perundangan yang ada masih menekankan pada kegiatan fisik, sehingga kurang dapat mengakomodasi kebutuhan terhadap perencanaan kegiatan secara utuh; 4) masih terbatasnya kapasitas perencanaan DAK yang berbasis kinerja, serta selaras dan terpadu dengan perencanaan sektoral nasional; 5) masih rendahnya akurasi data teknis yang diperlukan untuk perencanaan dan alokasi DAK; 6) formula alokasi DAK yang ada belum sepenuhnya dapat menjamin kesesuaian antara kepentingan nasional dan kebutuhan daerah; 7) masih kurang terintegrasinya DAK ke dalam siklus dan mekanisme perencanaan pembangunan nasional dan daerah; 8) belum tersedianya pedoman yang jelas tentang koordinasi pengelolaan DAK secara utuh dan terpadu di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota; 9) masih kurangnya sinkronisasi kegiatan DAK dengan kegiatan lain yang didanai APBD; 10) masih kurangnya koordinasi dan keterpaduan dalam pemantauan dan evaluasi DAK serta rendahnya kepatuhan daerah dalam penyampaian laporan pelaksanaan DAK ke pusat; dan 11) masih relatif lemahnya pengawasan daerah terhadap pelaksanaan kegiatan DAK.

Berdasarkan kendala dan permasalahan tersebut, sasaran yang ingin dicapai dalam kurun waktu 2010-2014 adalah meningkatnya efektivitas DAK sebagai instrumen pendanaan dalam rangka mendorong pembangunan daerah untuk mendukung pencapaian berbagai prioritas pembangunan nasional dalam RPJMN 2010-2014.

Untuk mencapai sasaran tersebut, arah kebijakan DAK dalam RPJMN 2010-2014 adalah sebagai berikut:

1. Menyempurnakan desain konsep DAK dalam rangka memperjelas kedudukan, peran dan misi DAK sebagai salah satu instrumen pendanaan desentralisasi yang efektif untuk membantu mengurangi kesenjangan antar daerah dalam penyediaan pelayanan dasar publik dan memberikan insentif kepada daerah tertentu untuk meningkatkan upaya pencapaian sasaran prioritas nasional;
2. Meningkatkan secara bertahap pagu nasional DAK agar lebih optimal untuk mendukung pencapaian prioritas nasional. Selain itu akan dilakukan transformasi dari dana K/L yang digunakan untuk mendanai urusan daerah, seperti antara lain: dana Biaya Operasional Sekolah (BOS) dan dana pengembangan infrastruktur perdesaan, ke DAK;

3. Mendukung program yang menjadi prioritas nasional dalam RPJMN 2010-2014 sesuai kerangka pengeluaran jangka menengah dan penganggaran berbasis kinerja (*performance based budgeting*), termasuk program yang bersifat lintas (*cross cutting*) sektor dan program yang bersifat kewilayahan yang menjadi prioritas nasional;
4. Diprioritaskan untuk membantu daerah-daerah yang memiliki kemampuan keuangan relatif rendah dalam membiayai pelayanan publik sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM);
5. Meningkatkan kualitas perencanaan melalui penajaman indikator kinerja, dan penyediaan data teknis yang akurat;
6. Meningkatkan koordinasi pengelolaan DAK secara utuh dan terpadu di pusat dan daerah, meningkatkan sinkronisasi kegiatan DAK dengan kegiatan lain yang didanai APBN dan APBD, serta meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan DAK di daerah.;

Alokasi DAK ke daerah ditentukan berdasarkan kriteria alokasi yang ditetapkan dalam undang-undang. Menurut UU No. 33 Tahun 2004, kriteria tersebut terdiri dari kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis. Kriteria tersebut disempurnakan sejalan dengan revisi UU No. 33 Tahun 2004.

Bidang DAK ditentukan berdasarkan identifikasi kebutuhan DAK untuk mendukung pencapaian prioritas nasional. Sehubungan dengan itu, dalam RPJMN 2010-2014 bidang-bidang yang layak dipertimbangkan untuk didanai DAK meliputi antara lain: pelayanan dasar publik yang bersifat wajib seperti pendidikan dasar, kesehatan dasar, keluarga berencana, ketahanan pangan; infrastruktur dasar; logistik nasional; lingkungan hidup; dan kewilayahan (daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan pasca konflik).

Dalam RPJMN 2010-2014 bidang-bidang yang didanai DAK adalah:

1. Khusus tahun 2010, bidang DAK telah ditetapkan meliputi: a) Pendidikan, b) Kesehatan, c) Infrastruktur Jalan, d) Infrastruktur Irigasi, e) Infrastruktur Air Minum, f) Infrastruktur Sanitasi, g) Prasarana Pemerintahan Daerah, h) Kelautan dan Perikanan, i) Pertanian, j) Lingkungan Hidup, k) Keluarga Berencana, l) Kehutanan, m) Sarana dan Prasarana Perdesaan, dan n) Sarana Perdagangan.
2. Pada tahun-tahun selanjutnya bidang kegiatan yang didanai DAK akan ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun anggaran bersangkutan.

Arah Kebijakan Pengalokasian Dana Otonomi Khusus

Berdasarkan UU Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi undang-undang, Dana Otsus dialokasikan baik untuk Provinsi Papua maupun Provinsi Papua Barat beserta seluruh kabupaten/kota yang berada di daratan Papua, dengan ketentuan: (i) dana otonomi khusus yang besarnya 2 persen dari total DAU Nasional akan dibagi antara Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat; (ii) tambahan dana otonomi khusus untuk infrastruktur akan diberikan kepada Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat secara terpisah sesuai dengan kesepakatan antara pemerintah dan DPR. Jika dalam perkembangannya terdapat daerah pemekaran baru maka kebijakan dan alokasinya akan dikoordinasikan terlebih dahulu antara Pemerintah Pusat, provinsi, dan kabupaten/kota terkait.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Dana Otsus juga dialokasikan untuk Provinsi NAD dengan nilai setara 2 persen dari pagu DAU nasional selama 15 tahun, untuk tahun ke-16 hingga ke-20 menjadi sebesar 1 persen dari pagu DAU nasional. Dalam rangka optimalisasi pemanfaatan Dana Otsus, kebijakan yang ditempuh hingga saat ini antara lain dengan mensyaratkan adanya rekomendasi dari Menteri Dalam Negeri pada setiap tahap penyaluran, agar pemanfaatan Dana Otsus direncanakan dengan baik dan menghasilkan output bagi peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam RPJMN 2010-2014, kebijakan pengalokasian Dana Otsus berdasarkan UU Nomor 35 Tahun 2008 dan UU Nomor 11 Tahun 2006 terus dilanjutkan, dan arah kebijakannya adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan evaluasi secara menyeluruh terhadap pemanfaatan Dana Otsus selama ini;
2. Melakukan transformasi secara bertahap Dana Otsus ke Dana Perimbangan;
3. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas Dana Otsus Papua dan Papua Barat untuk mendanai pendidikan dan kesehatan;
4. Dana Tambahan Infrastruktur Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat diberikan dalam rangka otonomi khusus yang diutamakan untuk pendanaan pembangunan infrastruktur, sesuai dengan Pasal 34 ayat (3) huruf f Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008;
5. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas Dana Otsus NAD untuk pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, penanggulangan kemiskinan, serta pendidikan, sosial, dan kesehatan sesuai dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Untuk melaksanakan arah kebijakan dana perimbangan dan dana otonomi



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

khusus tersebut diperlukan penyempurnaan berbagai peraturan perundang-undangan terutama terkait Undang-Undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, serta peraturan-peraturan pelaksanaannya.

BAB VI

PENUTUP

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 merupakan penjabaran dari visi, misi dan program aksi pembangunan nasional dari pasangan Presiden/Wakil Presiden Susilo Bambang Yudhoyono – Boediono. RPJMN ini terdiri atas 3 (tiga) buku: yang pertama memuat prioritas pembangunan nasional, kedua memuat arah dan kebijakan bidang-bidang pembangunan, dan ketiga memuat arah kebijakan pembangunan kewilayahan. Dokumen ini selanjutnya menjadi pedoman bagi pemerintah dan masyarakat di dalam penyelenggaraan pembangunan nasional lima tahun ke depan.

Dokumen ini juga menjadi acuan di dalam penyusunan RPJM Daerah dan menjadi pedoman bagi pimpinan nasional dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahunan. Keberhasilan pembangunan nasional dalam mewujudkan visi TERWUJUDNYA INDONESIA YANG SEJAHTERA, DEMOKRATIS, DAN BERKEADILAN harus didukung oleh (1) komitmen dari kepemimpinan nasional yang kuat dan demokratis; (2) konsistensi kebijakan pemerintah; (3) keberpihakan kepada rakyat; dan (4) peran serta masyarakat dan dunia usaha secara aktif (5) sistem birokrasi pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel, dan efisien. Selain itu, sektor-sektor pembangunan lainnya serta penyelenggaraan fungsi pemerintahan yang tidak disebutkan secara spesifik di dalam dokumen ini tetap dilanjutkan di dalam rangka mencapai visi di atas.

Ke depan, melalui kerja keras, kebersamaan, dan kesungguhan segenap komponen bangsa, Bangsa Indonesia akan menjadi sebuah bangsa yang besar, maju, dan bermartabat. Bangsa yang menjadi kekuatan terpenting di Asia dan sejajar dengan bangsa dan negara-negara maju di dunia.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN

MATRIKS PENJABARAN PRIORITAS NASIONAL

PRIORITAS 1	REFORMASI BIROKRASI DAN TATA KELOLA
TEMA PRIORITAS	<i>Pemantapan tata kelola pemerintahan yang lebih baik melalui terobosan kinerja secara terpadu, penuh integritas, akuntabel, taat kepada hukum yang berwibawa, dan transparan. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang ditopang oleh efisiensi struktur pemerintah di pusat dan di daerah, kapasitas pegawai pemerintah yang memadai, dan data kependudukan yang baik</i>
PENANGGUNGJAWAB	Wakil Presiden
BEKERJASAMA	Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; Menteri Sekretaris Negara; Menteri Pendidikan Nasional; Menteri Perindustrian; Menteri Negara Koperasi dan UKM; Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral; Menteri Kelautan dan Perikanan; Menteri Keuangan; Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas; Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara; Menteri Pekerjaan Umum; Menteri Kehutanan; Menteri Pertanian; Menteri Dalam Negeri; Menteri Negara Riset dan Teknologi; Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia; Kepala Badan Pertanahan Nasional; Sekretaris Kabinet

NO	SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PAGU (Milyar Rupiah) TOTAL	K/L
				2010	2011	2012	2013	2014		
1. STRUKTUR										
Konsolidasi struktural dan peningkatan kapasitas kementerian/lembaga yang menangani aparatur negara yaitu Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN), Badan Kepegawaian Negara (BKN), dan Lembaga Administrasi Negara (LAN) pada 2010; Restrukturisasi lembaga pemerintah lainnya, terutama bidang penguatan keberdayaan UMKM, pengelolaan energi, pemanfaatan sumber daya kelautan, restrukturisasi BUMN, hingga pemanfaatan tanah dan penataan ruang bagi kepentingan rakyat banyak selambat-lambatnya 2014:										
1.	Koordinasi perencanaan dan evaluasi program kelembagaan	Terlaksananya konsolidasi struktural dan peningkatan kapasitas Kemeneg PAN dan RB, BKN, dan LAN.	Persentase penyelesaian konsolidasi struktural dan peningkatan kapasitas Kemeneg PAN dan RB, BKN, dan LAN.	100%					29,35	Kemeneg PAN dan RB
Terlaksananya penataan kelembagaan instansi pemerintah lainnya			Persentase instansi pemerintah (PPK-BLU) yang telah tertata kelembagaannya	20%	30%	50%	85%	100%		
		Persentase LNS yang telah tertata organisasi dan tata kerjanya	20%	30%	50%	85%	100%			
2.	Pengembangan Kebijakan, Koordinasi dan Evaluasi Kelembagaan Polhukam	Terlaksananya penataan kelembagaan instansi pemerintah lainnya, bidang polhukam	Persentase Kementerian Negara bidang Polhukam yang telah tertata organisasi dan tata kerjanya (antara lain Kementerian Setneg)	20%	30%	50%	85%	100%		
			Persentase LPNK bidang polhukam yang telah tertata organisasi dan tata kerjanya, terutama bidang pemanfaatan tanah dan penataan ruang bagi kepentingan rakyat (BPN)	20%	30%	50%	85%	100%		

NO	SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PAGU (Milyar Rupiah)	K/L
				2010	2011	2012	2013	2014		
			Persentase Sekretariat Lembaga Negara yang telah tertata organisasi dan tata kerjanya	20%	30%	50%	85%	100%		
3.	Pengembangan Kebijakan, Koordinasi dan Evaluasi Kelembagaan Perekonomian I	Terlaksananya penataan kelembagaan instansi pemerintah lainnya, bidang perekonomian I	Persentase Kementerian Negara bidang perekonomian I yang telah tertata organisasi dan tata kerjanya, terutama bidang penguatan keberdayaan UKMK (Kemeneg UKMK, Kemen. Perindustrian, Kemen. Perdagangan), pemanfaatan sumber daya kelautan (Kemen. Kelautan dan Perikanan), pemanfaatan tanah dan penataan ruang bagi kepentingan rakyat (Kemen. PU, Kemen. Kehutanan) dan Kemeneg PPN)	20%	30%	50%	85%	100%		
			Persentase LPNK bidang Perekonomian I yang telah tertata organisasi dan tata kerjanya	20%	30%	50%	85%	100%		
			Persentase Perwakilan RI yang telah tertata organisasi dan tata kerjanya	20%	30%	50%	85%	100%		
4.	Pengembangan Kebijakan, Koordinasi dan Evaluasi Kelembagaan Perekonomian II	Terlaksananya penataan kelembagaan instansi pemerintah lainnya, bidang perekonomian II	Persentase Kementerian Negara bidang perekonomian II yang telah tertata organisasi dan tata kerjanya, terutama bidang pengelolaan energi (Kemen. ESDM, restrukturisasi BUMN (Kemeneg BUMN), pemanfaatan tanah dan penataan ruang bagi kepentingan rakyat (Kemen. Pertanian) dan Kemeneg. Ristek).	20%	30%	50%	85%	100%		
			Persentase LPNK bidang Perekonomian II yang	20%	30%	50%	85%	100%		

NO	SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PAGU (Milyar Rupiah)	K/L
				2010	2011	2012	2013	2014	TOTAL	
5.	Pengembangan Kebijakan, Koordinasi dan Evaluasi Kelembagaan Kesra	Terlaksananya penataan kelembagaan instansi pemerintah lainnya, bidang kesra	telah tertata organisasi dan tata kerjanya							
			Persentase Kementerian Negara bidang kesra yang telah tertata organisasi dan tata kerjanya (antara lain Kemendiknas)	20%	30%	50%	85%	100%		
			Persentase LPNK bidang Kesra yang telah tertata organisasi dan tata kerjanya	20%	30%	50%	85%	100%		
			Persentase Pemda yang dievaluasi organisasi dan tatakerjanya	20%	30%	50%	85%	100%		
6.	Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan reformasi birokrasi	Meningkatnya koordinasi penyusunan kebijakan dan pelaksanaan reformasi birokrasi	Jumlah kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi yang diterbitkan (grand design RBN dan kebijakan pelaksanaannya)	100%					62,67	Kemeneq PAN dan RB
			Tingkat kualitas pelaksanaan RB yang terukur sesuai dengan kebijakan RB Nasional	70%	80%	85%	90%	100%		
			Persentase instansi yang menerima sosialisasi	100% K/L 30% Pemda	50% Pemda	70% Pemda	80% Pemda	100% Pemda		
			Persentase instansi pusat dan daerah yang dilakukan konsultasi asistensi reformasi birokrasi	100% K/L, 10% Pemda	40 pemda	60 pemda	80 pemda	100% Pemda		
			Jumlah laporan monitoring dan evaluasi	4 lap	4 laporan	4 laporan	4 laporan	4 laporan		

NO	SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PAGU (Milyar Rupiah)	K/L
				2010	2011	2012	2013	2014	TOTAL	
				triwulanan	triwulanan	triwulanan	triwulanan	triwulanan		
			Persentase K/L yang telah melaksanakan Reformasi Birokrasi sesuai kebijakan nasional	20 %				100%		
7.	Pembinaan dan koordinasi penyiapan produk hukum dan penataan organisasi KKP	Terselenggaranya pemenuhan peraturan perundang-undangan serta organisasi dan tata laksana	Persentase pemenuhan peraturan perundang-undangan serta efektivitas dan kemutakhiran hukum laut, perjanjian, peirizinan, organisasi dan tata laksana sesuai kebutuhan nasional dan tantangan global serta pelayanan bantuan hukum yang akuntabel	50%	60%	70%	80%	90%	66,0	KKP
2. OTONOMI DAERAH										
Penataan Otonomi Daerah melalui: 1) Penghentian/pembatasan pemekaran wilayah; 2) Peningkatan efisiensi dan efektivitas penggunaan dana perimbangan daerah; dan 3) Penyempurnaan pelaksanaan pemilihan kepala daerah										
1.	Penghentian/ Pembatasan Pemekaran Wilayah	Terlaksananya seluruh mekanisme pengusulan pemekaran dan penggabungan daerah sesuai dengan PP No 78 tahun 2007, dalam rangka penghentian/ pembatasan pemekaran wilayah/pembentukan daerah otonom baru.	Jumlah Strategi Dasar Penataan Daerah	1 paket					20,00	Kemendagri
			Persentase evaluasi setiap usulan pemekaran, penggabungan, dan penghapusan daerah sesuai dengan PP No 78 tahun 2007		100%	100%	100%	100%		
			Jumlah daerah otonom baru yang terbentuk berdasarkan usulan Pemerintah		0 (nol)	0 (nol)	0 (nol)	0 (nol)		
2.	Pembinaan Fasilitasi Dana Perimbangan	Peningkatan efektifitas pemanfaatan DAK sesuai Petunjuk Pelaksanaan (juklak)	Persentase Provinsi, Kab/Kota yang telah memanfaatkan DAK sesuai Juklak	70 %	75 %	80 %	85 %	90 %	73,77	Kemendagri
		Optimalisasi penyerapan DAK oleh daerah	Persentase daerah yang telah Optimal (100%) menyerap DAK	70 %	75 %	80 %	85 %	90 %		
		Terwujudnya tertib administrasi	Jumlah rekomendasi kebijakan untuk dukungan	1 paket						

NO	SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PAGU (Milyar Rupiah) TOTAL	K/L
				2010	2011	2012	2013	2014		
		Pengelolaan Keuangan Daerah yang akuntabel dan transparan	materi sebagai masukan terhadap revisi UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah.							
		Tersusunnya kebijakan/ regulasi di bidang fasilitasi dana perimbangan yang dapat diterapkan di daerah	Jumlah Permendagri	6	3	3	3	3		
			Jumlah Surat Edaran Mendagri	2 SE	1 SE	1 SE	1 SE	1 SE		
3.	Pembinaan Administrasi Anggaran Daerah	Peningkatan kualitas belanja daerah dalam APBD	Persentase daerah yang proporsi belanja langsungnya lebih besar dari belanja tidak langsung	30%	40%	50%	55%	60%		
			Persentase rata-rata belanja modal terhadap total belanja daerah	26%	27%	28%	29%	30%		
		Penetapan APBD secara tepat waktu	Persentase jumlah APBD yang disahkan secara tepat waktu.	60%	70%	80%	85%	90%		
4.	Pembinaan dan Fasilitasi Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan daerah	Provinsi dan kabupaten/ kota memiliki Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) berstatus Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).	Persentase daerah provinsi, Kab/Kota ber-LKPD dengan status WTP.	15%	30%	50%	75%	100%		
		Penetapan dan penyampaian Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD secara tepat waktu	Persentase penetapan dan penyampaian Raperda pertanggung jawaban pelaksanaan APBD yang disahkan secara tepat waktu.	40%	60%	70%	80%	90%		
5.	Perumusan kebijakan, bimbingan teknis, dan	Peningkatan Efektifitas dan Efisiensi Pengelolaan Dana Transfer	i. Persentase ketepatan jumlah penyaluran jumlah dana transfer ke daerah	100%	100%	100%	100%	100%	86,38	Kemenkeu

NO	SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PAGU (Milyar Rupiah) TOTAL	K/L
				2010	2011	2012	2013	2014		
	pengelolaan transfer ke Daerah	Terciptanya Tata Kelola yang Tertib Sesuai Peraturan Perundang-undangan, Transparan, adil, proporsional, Kredibel, Akuntabel, dan Profesional dalam Pelaksanaan Transfer ke Daerah	2. Ketepatan waktu penyelesaian dokumen pelaksanaan penyaluran dana transfer ke daerah	4 hari	4 hari	4 hari	4 hari	3 hari		
6.	Penyempurnaan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah	Tersusunnya UU tentang PEMILU Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan terselenggara ranya Pilkada yang efisien.	Persentase revisi terbatas UU No. 32 tahun 2004 terkait dengan efisiensi pelaksanaan Pilkada Jumlah UU tentang PEMILU Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100%					3,0	Kemendagri
3. SUMBER DAYA MANUSIA Penyempurnaan pengelolaan PNS yang meliputi sistem rekrutmen, pendidikan, penempatan, promosi, dan mutasi PNS secara terpusat selambat-lambatnya 2011										
1.	Penyusunan kebijakan perencanaan SDM aparatur	Tersusunnya kebijakan (PP) tentang sistem pengadaan /rekrutmen dan Seleksi PNS Tersusunnya kebijakan (PP) tentang Kebutuhan Pegawai (Formasi)	Jumlah PP Jumlah PP	1 PP	sosialisasi	sosialisasi			20,06	Kemeneg PAN dan RB
2.	Pengembangan kebijakan pematapan pengembangan SDM aparatur	Tersusunnya kebijakan tentang manajemen ke-pegawaian (<i>UU tentang SDM Aparatur Negara</i>).	- Jumlah UU dan peraturan pelaksanaannya		1 RUU	1 UU & peraturan pelaksanaannya	Sosialisasi	Sosialisasi	11,27	Kemeneg PAN dan RB

NO	SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PAGU (Milyar Rupiah)	K/L
				2010	2011	2012	2013	2014	TOTAL	
		Tersusunnya kebijakan tentang pola dasar karir PNS	- Jumlah Perpres;	1 Perpres	Sosialisasi					
		Tersusunnya kebijakan tentang penilaian kinerja pegawai (SKP)	- Jumlah PP	1PP						
		Tersusunnya kebijakan tentang penilaian, pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dlm dan dr jabatan struktural	Jumlah Perpres	1 Perpres						
		Tersusunnya kebijakan diklat jabatan PNS	Jumlah PP		1 PP					
		Tersusunnya kebijakan tentang pengangkatan PNS dalam jabatan struktural	Jumlah PP		1 PP					
3.	Pengembangan kebijakan kesejahteraan SDM aparatur	Tersusunnya kebijakan (UU/ PP) ttg remunerasi dan tunjangan kinerja Pegawai Negeri	Jumlah UU/PP ttg remunerasi/ tunjangan kinerja Pegawai Negeri;	1 UU/ PP					16,25	Kemeneg PAN dan RB
		Tersusunnya kebijakan sistem pensiun PNS	Jumlah UU/PP tentang Pensiun PNS		1 UU/ PP					
		Tersusunnya kebijakan ttg sistem pengelolaan dana pensiun PNS	Jumlah kebijakan tentang pengelolaan dana pensiun PNS	1 PP						
4.	REGULASI Percepatan harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundangan di tingkat pusat maupun daerah hingga tercapai keselarasan arah dalam implementasi pembangunan, di antaranya penyelesaian kajian 12.000 peraturan daerah selambat-lambatnya 2011.									

NO	SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PAGU (Milyar Rupiah)	K/L
				2010	2011	2012	2013	2014	TOTAL	
1.	Penataan Produk Hukum dan Pelayanan Bantuan Hukum Departemen	Percepatan harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan di tingkat pusat dan daerah hingga tercapai keselarasan arah dalam implementasi pembangunan	Jumlah perda yang dikaji	3.000 perda	9.000 perda	3.000 perda	2.500 perda	2.500 perda	12,50	Kemendagri
2.	Kegiatan fasilitasi perancangan peraturan daerah	Meningkatnya pemerin-tahan provinsi, kab/kota yang di petakan dan yang mempublikasikan perdanya dalam sistem informasi peraturan daerah	% pemerintahan daerah	20%	40%	60%	80%	100%	9.0	Kemenkumha m
3.	Perumusan kebijakan bimbingan teknis, monitoring, dan evaluasi di bidang PDRD	<ol style="list-style-type: none"> 1. Optimalisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 2. Mewujudkan Kebijakan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang mendukung Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase jumlah kebijakan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dapat diimplementasikan 2. Realisasi janji pelayanan evaluasi Perda/Raperda PDRD ke pihak eksternal dalam bentuk rekomendasi Menteri Keuangan 3. Evaluasi dan rekomendasi Perda dan Raperda PDRD bermasalah 4. Program transisi/pengalihan PBB menjadi Pajak Daerah 5. Pengalihan BPHTB menjadi Pajak Daerah 6. Penerapan Pajak Rokok menjadi Pajak Daerah 7. RPP tentang sistem pemungutan pajak daerah 8. RPKM pemberian sanksi terhadap daerah yang 	80%	80%	82%	84%	85%	68,69	Kemenkeu
				15 hari	15 hari	14 hari	13 hari	12 hari		
				75%	80%	85%	90%	100%		
				-	50%	50%	100%	-		
				-	100%	-	-	-		
				-	50%	75%	100%	-		
				100%	-	-	-	-		
				100%	-	-	-	-		

NO	SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PAGU (Milyar Rupiah)	K/L
				2010	2011	2012	2013	2014		
			melanggar ketentuan PDRD 9. Mengkaji penerapan PBBKB di daerah berkaitan dengan harga dan subsidi BBM	100%	-	-	-	-		
5. SINERGI ANTARA PUSAT DAN DAERAH										
Penetapan dan penerapan sistem Indikator Kinerja Utama Pelayanan Publik yang selaras antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah										
1.	Penetapan Indikator Kinerja Utama Pelayanan Publik yang selaras antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah	Tersusunnya SPM Bidang lainnya yang belum diterbitkan sampai dengan akhir tahun 2009	Jumlah SPM yang ditetapkan	13 SPM	17 SPM				7,50	Kemendagri
2	Penerapan Indikator Utama Pelayanan Publik di Daerah	Meningkatnya Implementasi Urusan Pemerintahan Daerah dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Daerah.	Jumlah Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah diterapkan oleh Daerah	5 SPM	10 SPM	17 SPM			20,0	Kemendagri
			Jumlah bidang SPM yang dimonitor penerapannya				17 Bidang SPM			
			Jumlah bidang SPM yang dievaluasi penerapannya					17 Bidang SPM		
3	Koordinasi perencanaan dan evaluasi program pelayanan publik	Tersusunnya peraturan pelaksanaan dari UU No. 25/2009 tentang Pelayanan Publik	Jumlah PP	5					18,28	Kemeneg PAN dan RB
			Jumlah Perpres	1						
			Persentase instansi yg mendapat sosialisasi	35%	70%	100%				
4	Peningkatan koordinasi dan evaluasi pelayanan di bidang kesejahteraan sosial	Terlaksananya penilaian, monitoring dan evaluasi pelayanan publik	Jumlah instrumen penilaian, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik	1					23,92	Kemeneg PAN dan RB
			Laporan hasil pelaksanaan penilaian pelayanan		1	1	1	1		

NO	SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PAGU (Milyar Rupiah)	K/L
				2010	2011	2012	2013	2014	TOTAL	
		Tersusunnya kebijakan percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik	Jlh inpres tentang percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik	1						
		Terlaksananya asistensi untuk mendorong penerapan OSS/PTSP	Persentase Pemda yang menerapkan OSS (pelayanan terpadu satu pintu)	70%	75%	88%	90%	95%		
5	Peningkatan koordinasi dan evaluasi pelayanan publik di bidang pemerintahan umum, hukum dan keamanan	Terlaksananya kompetisi antar unit pelayanan publik/antar instansi dan Pemerintah Daerah	Jumlah unit pelayanan yang dinilai berdasarkan usulan	150 unit	200 unit	250 unit	300 unit	350 Unit	23,63	Kemeneq PAN dan RB
			Jumlah Pemda yang dinilai berdasarkan usulan Provinsi	100 Kab/Kota	105 Kab/Kota	110 Kab/Kota	115 Kab/Kota	120 Kab/Kota		
			Persentase unit pelayanan/Pemda yang berkategori terbaik sesuai penilaian	50%	60%	70%	80%	90%		
			Persentase unit pelayanan/Pemda yang berkategori baik sesuai penilaian	50%	60%	70%	80%	90%		
6. PENEGAKAN HUKUM										
Peningkatan integrasi dan integritas penerapan dan penegakan hukum oleh seluruh lembaga dan aparat hukum										
1.	Penyelidikan dan penyidikan Tindak Pidana Kewilayahan	Meningkatnya clearance rate tindak pidana di tingkat masyarakat	Jumlah perkara dan clearance rate seluruh tindak pidana di wilayah Polda	55%	55%	57%	57%	58%	2.697,63	POLRI
2.	Pengawasan dan pemeriksaan kinerja serta perilaku aparat MA dan badan peradilan di bawahnya	Meningkatnya kualitas kinerja hakim dan aparat peradilan dan kepercayaan publik kepada lembaga peradilan	Jumlah laporan pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan kinerja serta perilaku hakim dan aparat peradilan	100	100	100	100	100	10.50	MA-RI
3.	Penyelenggaraan Kegiatan di bidang Pengelolaan Benda	pengelolaan benda sitaan Negara dan barang rampasan Negara	•Persentase benda sitaan negara dan barang rampasan negara yang dikelola secara tepat	70%	75%	80%	85%	90%	2.0	Kemenkumha

NO	SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PAGU (Milyar Rupiah) TOTAL	K/L
				2010	2011	2012	2013	2014		
	Sitaan Negara dan barang Rampasan Negara		waktu dan akuntabel							m
4.	Pembinaan Kegiatan di bidang Keamanan dan Ketertiban	Lapas rutan memenuhi standar hunian dan keamanan, penanganan kasus NAPZA, penanganan aduan masyarakat / tahanan	•Persentase	10%	15%	20%	25%	30%	5.8	Kemenkumham
5.	Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pelayanan Tahanan dan Pembinaan Narapidana	Tahanan dan narapidana yang teregistrasi dan terklasifikasi secara tepat dan akuntabel	•Persentase	62%	67%	72%	77%	82%	3.4	Kemenkumham
		Narapidana terserap di kegiatan kerja secara tepat dan akuntabel	•Persentase	60%			80%			
		Narapidana yang memperoleh pembinaan kepribadian secara tepat dan akuntabel	•Persentase	60%			90%			
6.	Pembinaan kegiatan di bidang Bimbingan kemasyarakatan dan Anak	Penyelenggaraan kegiatan bimbingan kemasyarakatan dan anak yang berkualitas	<ul style="list-style-type: none"> • Persentasi anak didik pemsayarakatan • Persentase klien pemsayarakatan • Persentase anak didik pemsayarakatan dan klien pemsayarkatan yang mendapatkan litmas secara tepat dan akuntabel 	62%	67%	72%	77%	82%	7.1	Kemenkumham
7.	Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan dan Manajemen	Peningkatan kualitas SDM hukum dan HAM	•peningkatan kinerja lulusan diklat kepemimpinan dan manajemen pada unit kerja	10%	21%	31%	41%	51% atau 1377 Pegawai	38.0	Kemenkumham

NO	SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PAGU (Milyar Rupiah)	K/L
				2010	2011	2012	2013	2014	TOTAL	
8.	Kegiatan penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis	Peningkatan kualitas SDM hukum dan HAM	Persentase peningkatan kinerja lulusan diklat di bidang teknis pada unit kerjanya	25%	47%	62%	85%	100% atau 5400 Pegawai	37.0	Kemenkumham
9.	Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Fungsional HAM	Peningkatan kualitas SDM hukum dan HAM	Persentase peningkatan kinerja lulusan diklat di bidang fungsional dan HAM pada unit kerjanya	20%	40%	60%	80%	100% atau 2400 pegawai	40.60	Kemenkumham
10.	Kegiatan Pendidikan Kedinasan	Peningkatan kualitas SDM hukum dan HAM	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase lulusan yang menguasai ilmu dan keahlian teknis pemyarakatan • Persentase lulusan yang menguasai ilmu dan keahlian teknis keimigrasian 	92%	93%	95%	97%		50.2	Kemenkumham
11.	Kegiatan Pengelolaan dan Pembinaan Kepegawaian Kemenkumham	Peningkatan kualitas SDM Kemenkumham	• Persentase unit kerja yang memiliki kaderisasi berkesinambungan dan pegawai yang memperoleh pengembangan karir	100%	100%	100%	100%	100%	108.2	Kemenkumham
12.	Kegiatan pengawasan Inspektorat khusus	Tersedianya mekanisme pengaduan masyarakat yang responsif terhadap kinerja lembaga peradilan	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase pengaduan dan kasus yang dituntaskan secara tepat waktu • Jumlah unit pengaduan masyarakat di tiap lembaga penegak hukum 	20%	40%	60%	80%	100%	19.0	Kemenkumham
13.	Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kejaksaan	Meningkatnya kemampuan profesional, integritas kepribadian dan disiplin di lingkungan Kejaksaan.	• Jumlah pendidikan dan pelatihan baik penjenjangan maupun fungsional	35 diklat	36 diklat	36 diklat	38 diklat	40 diklat	420.00	Kejaksaan Agung
14.	Penyelidikan Tindak Pidana	Penyelidikan	Kasus Potensial (Kasus)	60	65	70	75	80	45.24	KPK

NO	SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PAGU (Milyar Rupiah)	K/L
				2010	2011	2012	2013	2014	TOTAL	
	Korupsi		Kasus Solid (Kasus)	28	30	40	42	45		
15	Penyidikan Tindak Pidana Korupsi	Penyidikan	Penyidikan (Perkara)	55	60	65	70	75	44.85	KPK
			Penyidikan Lengkap (Perkara)	38	40	42	45	47		
16	Penuntutan dan Eksekusi Tindak Pidana Korupsi	Penuntutan	Penuntutan (Perkara)	45	50	55	60	65	50.48	KPK
			Berkas Perkara yang dilimpahkan ke Pengadilan Negeri(Perkara)	38	40	42	45	47		
		Eksekusi	Pelaksanaan Pidana Badan (Persen)	100%	100%	100%	100%	100%		
17	Koordinasi dan Supervisi Penindakan (Korsup) TPK	Korsup Penindakan	Peningkatan Perkara yang disupervisi KPK (Persen)	100%	100%	100%	100%	100%	22.52	KPK
			Peningkatan Jumlah Penerimaan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan/SPDP (Persen)	100%	100%	100%	100%	100%		
18	Pengelolaan LHKPN	Penanganan LHKPN	LHKPN yang diumumkan dalam TBN (Jumlah Penyelenggara Negara)	21.000	17.000	17.000	17.000	17.000	45.82	KPK
			Klarifikasi kepada Penyelenggara Negara	330	400	440	480	510		
			Kasus diserahkan kepada Dit.Lidik (Jumlah)	3	4	4	5	5		
19.	Pengelolaan Gratifikasi	Penanganan Gratifikasi	Jumlah SK Penetapan Status Gratifikasi	300	330	360	390	420	15.42	KPK
			Kasus diserahkan kepada Dit.Lidik (Jumlah)	6	8	8	10	10		
			Jumlah Instansi/ Lembaga (Pem., BUMN dan Swasta) yang melaksanakan Program Pengendalian Anti Gratifikasi	2	4	6	8	10		

NO	SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PAGU (Milyar Rupiah)	K/L
				2010	2011	2012	2013	2014	TOTAL	
20.	Penyelenggaraan Pendidikan, Sosialisasi, dan Kampanye Anti Korupsi	Pendidikan, Sosialisasi, dan Kampanye	Jumlah Sekolah/ Lembaga pendidikan yang menerapkan Modul Anti Korupsi	60	75	90	110	125	57.83	KPK
			Peningkatan Komunitas Anti Korupsi	15	15	20	20	30		
			Instansi/Lembaga (Pem, Swasta, Masy) yang Melaks. Zona Anti Korupsi (Jumlah)	10	15	20	25	25		
21.	Pengembangan dan Pemanfaatan Jaringan Kerjasama Antara Lembaga/Instansi	Kerjasama dengan Lembaga/Instansi	Tingkat Kepuasan Layanan Kerja sama Antar Lembaga (Indeks)	70%	75%	75%	80%	80%	24.71	KPK
22.	Penyediaan Data dan Informasi untuk Pemberantasan Korupsi	Teknologi Informasi	Pemenuhan permintaan informasi dan data (Persentase)	60%	65%	70%	70%	75%	15.69	KPK
23.	Penanganan Pengaduan Masyarakat	Penanganan Dumas	Kasus siap LIDIK (Jumlah)	56	72	80	88	96	24.98	KPK
24.	Seleksi Hakim Agung, seleksi ha-kim dan Pemberian Penghargaan Hakim	Memperoleh calon hakim agung kompeten untuk diajukan ke DPR, serta pemberian apresiasi terhadap kinerja para hakim, serta hakim yang kompeten untuk bertugas dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama dan peradilan tata usaha negara	Jumlah calon Hakim Agung yang mendaftar	80 pendaftar	--	79 pendaftar	84 pendaftar	90 pendaftar	45,8	Komisi Yudisial
			Jumlah calon Hakim Agung yang lulus seleksi	6 CHA	--	30 CHA	27 CHA	9 CHA		
			Jumlah hakim berprestasi yg diusulkan menerima penghargaan	4 hakim	4 hakim	4 hakim	4 hakim	4 hakim		
			Jumlah pelaksanaan monitoring profesionalisme hakim agung	1 keg	1 keg	2 keg	2 keg	3 keg		

NO	SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PAGU (Milyar Rupiah)	K/L
				2010	2011	2012	2013	2014		
			Jumlah putusan hakim yang diteliti dan dianalisa	200 penelitian	200 penelitian	200 penelitian	200 penelitian	200 penelitian		
			% putusan hakim yang benar	100%	100%	100%	100%	100%		
			Biaya penelitian putusan hakim (dlm ribu)	Rp.50.000	Rp.50.00 0	Rp.50.000	Rp.50.000	Rp.50.00 0		
			% peserta yg mendaftar dalam seleksi calon hakim agung	75%	--	75%	80%	85%		
			% Hakim Agung yang profesional hasil seleksi	75%	--	75%	80%	85%		
			% calon Hakim Agung yang lulus seleksi	75%	--	75%	80%	85%		
			% calon hakim yg me ndapat penghargaan	75%	75%	80%	85%	90%		
			Jumlah peserta seleksi calon hakim yang mendaftar	1000 org	1000 org	1200 org	1200 org	1300 org		
			Jumlah peserta seleksi calon hakim yang lulus seleksi	500 peserta	500 peserta	600 peserta	600 peserta	650 peserta		
			% peserta seleksi calon hakim yang lulus sesuai kompetensi	80%	80%	80%	80%	80%		
			Penurunan biaya rata-rata seleksi calon hakim	20%	20%	20%	20%	20%		
			Biaya seleksi hakim agung per pendaftar (dmln ribu)	Rp.32.500	--	Rp.42.350	Rp.46.580	Rp.51.24 0		
			Biaya pemberian penghargaan hakim (dmln ribu)	Rp.1.000.00 0	Rp.1.000.00 0	Rp.1.100.000	Rp.1.000.00 0	Rp.1.200.0 00		

NO	SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PAGU (Milyar Rupiah)	K/L
				2010	2011	2012	2013	2014	TOTAL	
25.	Pelayanan Pengawasan Perilaku Hakim dan peningkatan kompetensi hakim	Penyelesaian laporan pengaduan hakim yang diduga melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim serta meningkatnya kemampuan profesionalisme hakim	Jumlah pengaduan masyarakat	1.719 lap	1.540 lap	1.390 lap	1.250 lap	1.130 lap	47,5	Komisi Yudisial
			Jumlah yang diproses melalui Majelis Kehormatan Hakim (MKH)	15 sidang	20 sidang	20 sidang	25 sidang	25 sidang		
			% pengaduan masyarakat yang ditangani	70%	70%	75%	75%	75%		
			% hasil putusan Majelis Kehormatan Hakim yang sesuai dengan prinsip kode etik dan pedoman perilaku hakim	100%	100%	100%	100%	100%		
			Biaya penanganan laporan pengaduan masyarakat hingga tuntas	Penghematan 20%	Penghematan 20%	Penghematan 20%	Penghematan 20%	Penghematan 20%		
			Jumlah pelatihan kemampuan dan profesionalisme hakim yang dilaksanakan	5 pelatihan	5 pelatihan	7 pelatihan	7 pelatihan	9 pelatihan		
			% Peningkatan kemampuan dan profesionalisme hakim	80%	80%	85%	85%	90%		

NO	SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PAGU (Milyar Rupiah)	K/L
				2010	2011	2012	2013	2014	TOTAL	
7. DATA KEPENDUDUKAN										
Penetapan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan pengembangan Sistem Informasi dan Administrasi Kependudukan (SIAK) dengan aplikasi pertama pada Kartu Tanda Penduduk selambat-lambatnya pada 2011										
1.	Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu	Terlaksananya tertib administrasi kependudukan dengan tersedianya data dan informasi penduduk yang akurat dan terpadu.	Jumlah kabupaten/kota yang memberikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) kepada setiap penduduk.	497	497				6.600 (Angka sementara untuk 5 tahun. Kepastian alokasi dana pertahun menunggu penyelesaian Grand Design)	Kemendagri
			Jumlah penduduk yang menerima e-KTP berbasis NIK dengan perekaman sidik jari	4,2 juta jiwa di 6 kab/kota	67,29 juta jiwa di 191 kab/kota	100,51 juta jiwa di 300 kab/kota				

PRIORITAS 2	PROGRAM AKSI BIDANG PENDIDIKAN
TEMA PRIORITAS	<i>Peningkatan akses pendidikan yang berkualitas, terjangkau, relevan, dan efisien menuju terangkatnya kesejahteraan hidup rakyat, kemandirian, keluhuran budi pekerti, dan karakter bangsa yang kuat. Pembangunan bidang pendidikan diarahkan demi tercapainya pertumbuhan ekonomi yang didukung keselarasan antara ketersediaan tenaga terdidik dengan kemampuan: 1) menciptakan lapangan kerja atau kewirausahaan dan 2) menjawab tantangan kebutuhan tenaga kerja.</i>
PENANGGUNGJAWAB	Menteri Pendidikan Nasional
BEKERJASAMA DENGAN	Menteri Komunikasi dan Informatika; Menteri Agama

No	SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PAGU (Rp. MILIAR) TOTAL	K/L
				2010	2011	2012	2013	2014		
1.	AKSES PENDIDIKAN DASAR-MENENGAH Peningkatan Angka Partisipasi Murni (APM) pendidikan dasar dari 95% di 2009 menjadi 96% di 2014 dan APM pendidikan setingkat SMP dari 73% menjadi 76% dan Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan setingkat SMA dari 69% menjadi 85%; Pemantapan/ rasionalisasi implementasi BOS, penurunan harga buku standar di tingkat sekolah dasar dan menengah sebesar 30-50% selambat-lambatnya 2012 dan penyediaan sambungan internet ber-content pendidikan ke sekolah tingkat menengah selambat-lambatnya 2012 dan terus diperluas ke tingkat sekolah dasar.								184.789	
a.	Penjaminan Kepastian Layanan Pendidikan SD Peningkatan Akses dan Mutu Madrasah Ibtidaiyah	Tercapainya Keluasan dan Kemerataan Akses Jenjang SD Bermutu di Semua Kab/Kota	APM Jenjang SD/ sederajat	95,2%	95,3%	95,7%	95,8%	96,0%		Kemendiknas Kemenag
b.	Penjaminan Kepastian Pendidikan SMP/SMPLB Peningkatan Akses dan Mutu Madrasah Tsanawiyah	Tercapainya Keluasan dan Kemerataan Akses Jenjang SMP Bermutu di Semua Kab/Kota	APM Jenjang SMP/ sederajat	74,0%	74,7%	75,4%	75,7%	76,0%		Kemendiknas Kemenag
c.	Penyediaan dan Peningkatan Pendidikan SMK Penyediaan dan Peningkatan Pendidikan SMA/SMLB Peningkatan Akses dan Mutu Madrasah Aliyah	Tercapainya Perluasan dan Pemerataan Akses Pendidikan Jenjang Menengah Bermutu, dan Relevan dengan Kebutuhan Masyarakat, di Semua Kab/Kota	APK Jenjang Menengah	73,0%	76,0%	79,0%	82,0%	85,0%		Kemendiknas Kemenag
d.	Penyediaan subsidi Pendidikan SD/SDLB berkualitas Penyediaan subsidi Pendidikan SMP/SMPLB berkualitas	Tersalurkannya subsidi pendidikan bagi siswa SD/ SDLB Tersalurkannya bantuan sosial pendidikan bagi siswa SMP/SMPLB	Jumlah Siswa SD/SDLB Sasaran BOS Jumlah Siswa SMP/SMPLB Sasaran BOS	27.672.820 9.660.639	27.973.000 9.965.000	28.006.000 10.354.000	28.085.000 10.632.000	28.211.000 10.870.000		Kemendiknas Kemenag
No	SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PAGU (Rp. MILIAR)	K/L

				2010	2011	2012	2013	2014	Total	
	Penyediaan Subsidi Pendidikan Madrasah Bermutu Penyediaan Subsidi Pendidikan Agama Islam Bermutu	Tersedianya anggaran BOS MI, MTs, Diniyah Ula, Diniyah Wustha	Siswa MI/Diniyah Ula penerima BOS Siswa MTs/Diniyah Wustha penerima BOS	3.555.803 3.238.713	3.626.919 3.303.487	3.681.322 3.353.039	3.736.543 3.403.335	3.791.591 3.454.385		
e.	Penyediaan Buku Ajar yang Bermutu dan Murah serta Pembinaan, Pengembangan, Keagrafikaan dan Pendidikan	Tersedianya Buku Ajar yang Bermutu dan Murah melalui pembelian Hak Cipta	Persentase Mata Pelajaran SD/Sederajat (Total 78 Jilid Mapel) Persentase Mata Pelajaran SMP/Sederajat (Total 47 Jilid Mapel) Persentase Mata Pelajaran SMA/Sederajat (Total 93 Jilid Mapel) Persentase Mata Pelajaran SMK (Total 493 Jilid Mapel)	100,0 100,0 100,0 52,0	- - - 64,0	- - - 76,0	- - - 88,0	- - - 100,0		Kemendiknas
f.	Penyediaan dan Peningkatan Pendidikan SMK Penyediaan dan Peningkatan Pendidikan SMA/SMALB Peningkatan Akses dan Mutu Madrasah Aliyah Penjaminan Kepastian Pendidikan SMP/ SMPLB Peningkatan Akses dan Mutu Madrasah Tsanawiyah Penjaminan Kepastian Layanan Pendidikan SD Peningkatan Akses dan Mutu Madrasah Ibtidaiyah	Tersedianya sambungan internet ber- <i>content</i> pendidikan di sekolah	Persentase SMK menerapkan pembelajaran berbasis TIK Persentase SMA yang menerapkan pembelajaran berbasis TIK Persentase satuan pendidikan jenjang SMP Menerapkan e-Pembelajaran dengan pendekatan CTL berbasis TIK Persentase SD Menerapkan e-Pembelajaran	50,0% 40,0% 21,4% 16%	60,0% 50,0% 34,8% 22%	70,0% 60,0% 48,2% 28%	82,0% 70,0% 61,6% 34%	100,0% 80,0% 75,0% 40%		Kemendiknas Kemenag
g.	Fasilitasi Penerapan dan Pengembangan E-Government	Kebijakan, regulasi, bimbingan teknis dan evaluasi pengembangan <i>e-government</i> nasional untuk mendorong peningkatan nilai <i>e-government</i> nasional menjadi 3,4 dan tingkat e-literasi menjadi 50%	Jumlah sekolah di 5 kab/kota provinsi DIY yang memiliki sistem e-pendidikan	50 sekolah	200 sekolah	250 sekolah	-	-	877,88	Kemenkominfo
2.	AKSES PENDIDIKAN TINGGI Peningkatan APK pendidikan tinggi menjadi 25% di 2014								126.584	
No	SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PAGU (Rp. MILIAR)	K/L

				2010	2011	2012	2013	2014	Total	
a.	Penyediaan Layanan Akademik Program Studi	Tersedianya Prodi yang Bermutu, Berdaya Saing Internasional, dan Relevan	APK PT dan PTA (Usia 19-23 Tahun)	24,80%	26,10%	27,40%	28,70%	30,0%		Kemendiknas Kemendiknas
	Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan Tinggi Islam									
3.	METODOLOGI Penerapan metodologi pendidikan yang tidak lagi berupa pengajaran demi kelulusan ujian (teaching to the test), namun pendidikan menyeluruh yang memperhatikan kemampuan sosial, watak, budi pekerti, kecintaan terhadap budaya-bahasa Indonesia melalui: Penyesuaian sistem Ujian Akhir Nasional pada 2011; dan Penyempurnaan kurikulum sekolah dasar-menengah sebelum tahun 2011 yang diterapkan di 25% sekolah pada 2012 dan 100% pada 2014								6.492	
a.	Penyediaan Informasi Hasil Penilaian Pendidikan	Tersedianya Informasi Penilaian Kualitas Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah	Kesesuaian Sistem Ujian Akhir Nasional dengan memperhatikan kemampuan sosial, watak, budi pekerti, kecintaan terhadap budaya-bahasa Indonesia	80%	100%	-	-	-		Kemendiknas
b.	Penyediaan Sistem Pembelajaran, Penyempurnaan Kurikulum Pendidikan Dasar dan Menengah	Tersedianya Model Kurikulum dan Pembelajaran Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.	Persentase penerapan kurikulum sekolah dasar-menengah yang disempurnakan	10%	15%	25%	65%	100%		
4.	PENGELOLAAN Pemberdayaan peran Kepala Sekolah sebagai manager sistem pendidikan yang unggul, revitalisasi peran Pengawas Sekolah sebagai entitas <i>quality assurance</i> , mendorong aktivasi peran Komite Sekolah untuk menjamin keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses pembelajaran, dan Dewan Pendidikan di tingkat Kabupaten.								436	
a.	Penyediaan Tenaga Kependidikan Formal untuk Seluruh Jenjang Pendidikan	Tersedianya Tenaga Kependidikan SD/MI, SMP/MTs, SMA/ SMK/MA Bermutu yang merata di Kabupaten dan Kota	Persentase Kepala SD/MI yang Sudah Mengikuti Training Kepala Sekolah Terakreditasi yang Berkualifikasi Menurut Kab/Kota	15%	25%	45%	70%	90%		Kemendiknas Kemendiknas
	Peningkatan Mutu dan Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Madrasah		Persentase Kepala SMP/MTs yang Sudah Mengikuti Training Kepala Sekolah Terakreditasi yang Berkualifikasi Menurut Kab/Kota	15%	30%	50%	75%	100%		
			Persentase Kepala SMA/SMK/MA yang Sudah Mengikuti Training Kepala Sekolah Terakreditasi yang Berkualifikasi Menurut Kab/Kota	15%	30%	50%	75%	100%		

No	SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PAGU (Rp. MILIAR)	K/L
				2010	2011	2012	2013	2014	Total	
b.	Penyediaan Tenaga Kependidikan Formal untuk Seluruh Jenjang Pendidikan	Tersedianya Tenaga Kependidikan SD/MI, SMP/MTs, SMA/ SMK/MA Bermutu yang merata di Kabupaten dan Kota	Persentase Pengawas SD/MI yang Sudah Mengikuti Training Kepala Sekolah Terakreditasi yang Berkualifikasi Menurut Kab/ Kota	10%	25%	50%	70%	90%		Kemendiknas Kemendiknas
	Peningkatan Mutu dan Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Madrasah		Persentase Pengawas SMP/ MTs yang Sudah Mengikuti Training Kepala Sekolah Terakreditasi yang Berkualifikasi Menurut Kab/ Kota	35%	50%	70%	85%	90%		
			Persentase Pengawas SMA/SMK/MA yang Sudah Mengikuti Training Kepala Sekolah Terakreditasi yang Berkualifikasi Menurut Kabupaten/Kota	35%	50%	70%	85%	90%		
c.	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pendidikan TK dan Pendidikan Dasar	Menguatnya tata kelola dan sistem pengendalian manajemen di Ditjen MPDM	Persentase Komite Sekolah yang berfungsi efektif	75%	80%	85%	90%	95%		
d.	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pendidikan TK dan Pendidikan Dasar	Menguatnya tata kelola dan sistem pengendalian manajemen di Ditjen MPDM	Peran serta masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pendanaan pendidikan melalui Dewan Pendidikan	meningkat	meningkat	meningkat	meningkat	meningkat		
5.	KURIKULUM Penataan ulang kurikulum sekolah yang dibagi menjadi kurikulum tingkat nasional, daerah, dan sekolah dengan memasukkan pendidikan kewirausahaan.							*) sudah termasuk dalam pagu substansi inti 3		
a.	Penyediaan Sistem Pembelajaran, Penyempurnaan Kurikulum Pendidikan Dasar dan Menengah	Tersedianya Model Kurikulum dan Pembelajaran Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah	Jumlah Model Kurikulum SD/MI	1	4	4	4	4		Kemendiknas
			Jumlah Model Kurikulum SMP/MTs	1	3	3	3	3		
			Jumlah Model Kurikulum SMA/MA	1	3	3	3	3		
			Jumlah Model Kurikulum SMK	1	5	5	5	5		

6.	KUALITAS Peningkatan kualitas guru, pengelolaan dan layanan sekolah, melalui: 1) program remediasi kemampuan mengajar guru; 2) penerapan sistem evaluasi kinerja profesional tenaga pengajar; 3) sertifikasi ISO 9001:2008 di 100% PTN, 50% PTS, 100% SMK sebelum 2014; 4) membuka luas kerjasama PTN dengan lembaga pendidikan internasional; 5) mendorong 11 PT masuk Top 500 THES pada 2014; 6) memastikan perbandingan guru:murid di setiap SD & MI sebesar 1:32 dan di setiap SMP & MTs 1:40; dan 7) memastikan tercapainya Standar Nasional Pendidikan (SNP) bagi Pendidikan Agama dan Keagamaan paling lambat tahun 2013.								117.372	
a.	Pendidikan dan Pelatihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Peningkatan Mutu dan Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Madrasah	Meningkatnya PEMBERDAYAAN dan Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase Guru Inti yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi dan Profesionalisme	20%	40%	60%	80%	100%		Kemendiknas Kemenag
b.	Peningkatan mutu dan Pembinaan lembaga diklat dan penjaminan mutu pendidikan Peningkatan Mutu dan Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Madrasah	Meningkatnya Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bermutu yang merata antar Provinsi, Kabupaten dan Kota	Jumlah Pengembangan Standar, Sistem, Program, Bahan dan Model Diklat Bagi Guru Per Tahun	20	20	20	20	20		Kemendiknas Kemenag
c.	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Dikti	Menguatnya tata kelola dan sistem pengendalian manajemen di Ditjen Dikti	Persentase PT BHMN Bersertifikat ISO 9001:2008	100%	100%	100%	100%	100%		Kemendiknas Kemenag
			Persentase PTN bersertifikat ISO 9001:2008	29%	54%	70%	90%	100%		
			Persentase Politeknik Negeri Bersertifikat ISO 9001:2008	26%	52%	74%	89%	100%		
			Persentase PTS (Institut/Universitas/Sekolah Tinggi) Bersertifikat ISO 9001:2008	18%	28%	38%	43%	53%		
			Persentase PTS (Politeknik/Akademi) Bersertifikat ISO 9001:2008	11%	21%	31%	36%	46%		
Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan Tinggi Islam	Tersedianya akses terhadap pendidikan tinggi bermutu berbasis keagamaan	Persentase PTAN bersertifikat ISO 9001:2008	20%	40%	60%	80%	100%			
	Penyediaan dan Peningkatan Pendidikan SMK	Tercapainya Perluasan dan Pemerataan Akses Pendidikan SMK Bermutu Relevan dengan Kebutuhan Masyarakat, di Semua Kab/Kota	Persentase SMK Bersertifikat ISO 9001:2000/ 9001:2008	26%	44%	63%	81%	100%		Kemendiknas
d.	Penyediaan Layanan Kelembagaan	Tersedianya dan Keluasan Akses PT yang Bermutu dan Berdaya saing Internasional	Jumlah PT Mengembangkan Kerjasama Kelembagaan Dalam dan Luar Negeri	40	48	56	64	72		Kemendiknas Kemenag
	Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan Tinggi Islam	Tersedianya akses terhadap pendidikan tinggi bermutu berbasis keagamaan								

No	SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PAGU (Rp. MILIAR)	K/L
				2010	2011	2012	2013	2014		
e.	Penyediaan Layanan Akademik Program Studi	Tersedianya Prodi yang Bermutu, Berdaya Saing Internasional, dan Relevan	Jumlah PT 500 Terbaik Dunia Versi THES	3	5	6	8	11		Kemendiknas
f.	Penyediaan Guru untuk Seluruh Jenjang Pendidikan	Tersedianya Guru SD/MI/SDLB, SMP/MTs/SMPLB Bermutu dan merata antar Provinsi, Kab/Kota	Persentase Kab/ Kota yang Telah Memiliki Rasio Pen-didik dan Peserta Didik SD/MI 1:32	48,0%	60%	75%	85%	100%		Kemendiknas Kemenag
	Peningkatan Mutu dan Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Madrasah		Persentase Kab/ Kota yang Telah Memiliki Rasio Pen-didik dan Peserta Didik 1:40	47,4%	50,5%	53,7%	56,8%	60,0%		
g.	Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan Agama Islam pada Sekolah	L terlaksananya Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama dan Keagamaan	Penyusunan dan penerapan Standar Nasional Pendidikan bagi Pendidikan Agama dan Keagamaan	Penyusunan Standar	Uji coba penerapan	Penerapan secara bertahap	Penerapan secara bertahap	Penerapan secara bertahap		Kemenag

PRIORITAS 3	RENCANA AKSI BIDANG KESEHATAN
TEMA PRIORITAS	<i>Penitikberatan pembangunan bidang kesehatan melalui pendekatan preventif, tidak hanya kuratif, melalui peningkatan kesehatan masyarakat dan lingkungan diantaranya dengan perluasan penyediaan air bersih, pengurangan wilayah kumuh sehingga secara keseluruhan dapat meningkatkan angka harapan hidup dari 70,7 tahun pada tahun 2009 menjadi 72,0 tahun pada tahun 2014, dan pencapaian keseluruhan sasaran Millennium Development Goals (MDGs) tahun 2015.</i>
PENANGGUNGJAWAB	Menteri Kesehatan
BEKERJASAMA DENGAN	Menteri Pekerjaan Umum; Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat

No.	SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PAGU (Rp. Miliar)	K/L
				2010	2011	2012	2013	2014	Total	
1. KESEHATAN MASYARAKAT										
Pelaksanaan upaya kesehatan preventif terpadu yang meliputi: penurunan tingkat kematian ibu saat melahirkan dari 228 (2007) menjadi 118 per 100.000 kelahiran hidup (2014); penurunan tingkat kematian bayi dari 34 (2007) menjadi 24 per 1.000 kelahiran hidup (2014); pemberian imunisasi dasar kepada 90% bayi pada tahun 2014 penyediaan akses sumber air bersih yang menjangkau 67% penduduk dan akses terhadap sanitasi dasar berkualitas yang menjangkau 75% penduduk sebelum tahun 2014										
1	Pembinaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Reproduksi	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan ibu dan Reproduksi	1. Persentase ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih (cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan (PN)) 2. Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal (cakupan kunjungan kehamilan ke empat (K4)) 3. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan KB sesuai standar	84	86	88	89	90	2.194,0	Kementerian Kesehatan
				84	86	90	93	95		
				10	40	75	90	100		

2.	Pembinaan Pelayanan Kesehatan Anak	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan anak	1. Cakupan kunjungan neonatal pertama (KN1) 2. Cakupan pelayanan kesehatan bayi 3. Cakupan pelayanan kesehatan balita	84 84 78	86 85 80	88 86 81	89 87 83	90 90 85	1.723,0	Kementerian Kesehatan
3	Pembinaan Imunisasi dan Karantina Kesehatan	Meningkatnya pembinaan di bidang imunisasi dan karantina kesehatan	Persentase bayi usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap	80	82	85	88	90	1.205,9	Kementerian Kesehatan
4	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	Tersedianya Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) untuk puskesmas	Jumlah puskesmas yang mendapatkan bantuan operasional kesehatan dan menyelenggarakan lokakarya mini untuk menunjang pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)	300	8.608	8.737	8.868	9.000	4.940,0	Kementerian Kesehatan
5	Penyehatan Lingkungan	Meningkatnya penyehatan dan pengawasan kualitas lingkungan	1. Persentase penduduk yang memiliki akses terhadap air minum berkualitas 2. Persentase kualitas air minum yang memenuhi syarat 3. Persentase penduduk yang menggunakan jamban sehat	62 85 64	62,5 90 67	63 95 69	63,5 100 72	67 100 75	2.054,5	Kementerian Kesehatan
6	Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, Pengembangan Sumber Pembiayaan dan Pola Investasi, serta Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	1.063 kawasan dan 4.650 desa	Jumlah kawasan dan desa yang terfasilitasi pembangunan air minum	159 kawasan dan 1.472 desa	179 kawasan dan 1.165 desa	195 kawasan dan 500 desa	247 kawasan dan 1000 desa	263 kawasan dan 700 desa	9.900,00	Kementerian Pekerjaan Umum
7	Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, Pengembangan Sumber Pembiayaan	387 *) Kawasan *) bukan target kumulatif	Jumlah kawasan dan desa yang terfasilitasi pembangunan sanitasi (air limbah, persampahan, dan drainase)	94	107	122	137	138	10.845,0	Kementerian Pekerjaan Umum

	Dan Pola Investasi, serta Pengelolaan Pengembangan Infrastruktur Sanitasi Dan Persampahan										
2. SARANA KESEHATAN											
Ketersediaan dan peningkatan kualitas layanan rumah sakit berakreditasi internasional di minimal 5 kota besar di Indonesia dengan target 3 kota pada tahun 2012 dan 5 kota pada tahun 2014											
1	Pembinaan Upaya Kesehatan Rujukan	Meningkatnya pelayanan medik spesialistik kepada masyarakat	Jumlah kota di Indonesia yang memiliki RS standar kelas dunia (<i>world class</i>)	1	2	3	4	5	434,5	Kementerian Kesehatan	
3. OBAT											
Pemberlakuan Daftar Obat Esensial Nasional sebagai dasar pengadaan obat di seluruh Indonesia dan pembatasan harga obat generik bermerek pada tahun 2010											
1	Peningkatan Ketersediaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan	Meningkatnya ketersediaan obat esensial generik di sarana pelayanan kesehatan dasar	Persentase ketersediaan obat dan vaksin	80	85	90	95	100	7.473,2	Kementerian Kesehatan	
4. ASURANSI KESEHATAN NASIONAL											
Penerapan Asuransi Kesehatan Nasional untuk seluruh keluarga miskin dengan cakupan 100% pada tahun 2011 dan diperluas secara bertahap untuk keluarga Indonesia lainnya antara tahun 2012-2014											
1	Pembinaan, Pengembangan Pembiayaan dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan	Terumuskannya kebijakan pembiayaan dan jaminan kesehatan	Persentase penduduk (termasuk seluruh penduduk miskin) yang memiliki jaminan kesehatan	59	70,3	84,4	94,5	100	842,4	Kementerian Kesehatan	
2	Pelayanan Kesehatan Rujukan Bagi Masyarakat Miskin (Jamkesmas)	Meningkatnya pelayanan kesehatan rujukan bagi penduduk miskin di RS	Persentase RS yang melayani pasien penduduk miskin peserta program Jamkesmas	75	80	85	90	95	24.782,7	Kementerian Kesehatan	
3	Pelayanan	Meningkatnya	Jumlah puskesmas yang memberikan pelayanan kesehatan dasar	8.481	8.608	8.737	8.868	9.000	6.447,2	Kementerian	

	Kesehatan Dasar Bagi Masyarakat Miskin (Jamkesmas)	pelayanan kesehatan dasar bagi penduduk miskin di puskesmas	bagi penduduk miskin								Kesehatan
4	Penataan Kelembagaan Jaminan Sosial Nasional	Terselenggaranya jaminan sosial berbasis asuransi bagi seluruh pekerja formal maupun informal dengan prioritas utama asuransi kesehatan.	Tingkat kesiapan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) pusat maupun daerah untuk melaksanakan jaminan sosial.	100%					50,09		Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat
5. KELUARGA BERENCANA											
Peningkatan kualitas dan jangkauan layanan KB melalui 23.500 klinik pemerintah dan swasta selama 2010-2014											
1	Pengembangan kebijakan dan pembinaan kesertaan ber-KB	Meningkatnya pembinaan, kesertaan, dan kemandirian ber-KB melalui 23.500 klinik KB pemerintah dan swasta	1. Jumlah klinik KB pemerintah dan swasta yang melayani KB 2. Jumlah klinik KB pemerintah dan swasta yang mendapat dukungan sarana prasarana	23.500 4.700	23.500 4.700	23.500 4.700	23.500 4.700	23.500 4.700	4.378,15		BKKBN
6. PENGENDALIAN PENYAKIT MENULAR											
Menurunnya angka kesakitan akibat penyakit menular pada 2014, yang ditandai dengan : Menurunnya prevalensi <i>Tuberculosis</i> dari 235 menjadi 224 per 100.000 penduduk; Menurunnya kasus malaria (<i>Annual Parasite Index-API</i>) dari 2 menjadi 1 per 1.000 penduduk; Terkendalinya prevalensi HIV pada populasi dewasa (persen) hingga menjadi < 0,5.											
1	Pengendalian Penyakit Menular Langsung	Menurunnya angka kesakitan dan kematian akibat penyakit menular langsung	1. Prevalensi kasus HIV 2. Jumlah kasus TB per 100.000 penduduk 3. Persentase kasus baru TB Paru (BTA positif) yang ditemukan 4. Persentase kasus baru TB Paru (BTA positif) yang disembuhkan 5. Persentase penduduk 15 tahun ke atas menurut pengetahuan tentang HIV dan AIDS	0,2 235 73 85 65	<0,5 231 75 86 75	<0,5 228 80 87 85	<0,5 226 85 87 90	<0,5 224 90 88 95	1.237,3		Kementerian Kesehatan
2	Pengendalian Penyakit Bersumber	Meningkatnya pencegahan dan	Angka penemuan kasus malaria per 1.000 penduduk	2	1,75	1,5	1,25	1	1.254,0		Kementerian Kesehatan

	Binatang	penanggulangan penyakit bersumber binatang									
--	----------	--------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

PRIORITAS 4	PENANGGULANGAN KEMISKINAN
TEMA PRIORITAS	<i>Penurunan tingkat kemiskinan absolut dari 14,1% pada 2009 menjadi 8-10% pada 2014 dan perbaikan distribusi pendapatan dengan perlindungan sosial yang berbasis keluarga, pemberdayaan masyarakat dan perluasan kesempatan ekonomi masyarakat yang berpendapatan rendah</i>
PENANGGUNGJAWAB	Wakil Presiden
BEKERJASAMA DENGAN	Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat; Menteri Koordinator Bidang Perekonomian; Menteri Kesehatan; Menteri Pendidikan Nasional; Menteri Sosial; Menteri Keuangan; Menteri Negara Koperasi dan UKM ; Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas

No	SUBSTANSI INTI/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PAGU (Rp. Milyar) TOTAL	K/L
				2010	2011	2012	2013	2014		
1.	BANTUAN SOSIAL TERPADU: Integrasi program perlindungan sosial berbasis keluarga yang mencakup program Bantuan Langsung Tunai (BLT) baik yang bersifat insidental atau kepada kelompok marginal, program keluarga harapan, bantuan pangan, jaminan sosial bidang kesehatan, beasiswa bagi anak keluarga berpendapatan rendah, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), dan Parenting Education mulai 2010 dan diperluas menjadi program nasional mulai 2011-2012									
1	Pembinaan, Pengembangan Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan	Terumuskannya kebijakan pembiayaan dan jaminan kesehatan	1. Persentase penduduk (termasuk seluruh penduduk miskin) yang memiliki jaminan kesehatan	59	70,3	84,4	94,5	100	842,4	Kemenkes
2	Pelayanan Kesehatan Dasar Bagi Masyarakat Miskin (Jamkesmas)	Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Dasar Bagi Penduduk Miskin di Puskesmas	Jumlah puskesmas yang memberikan pelayanan kesehatan dasar bagi penduduk miskin	8481	8608	8737	8868	9000	6.447,2	Kemenkes
3	Pelayanan Kesehatan Rujukan Bagi Masyarakat Miskin (Jamkesmas)	Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Rujukan Bagi Penduduk Miskin di RS	1. Persentase RS yang melayani pasien penduduk miskin peserta program Jamkesmas	75	80	85	90	95	24.782,7	Kemenkes

No	SUBSTANSI INTI /KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PAGU (Rp. Milyar)	K/L
				2010	2011	2012	2013	2014	TOTAL	
4	Pengembangan kebijakan dan pembinaan kesetaraan ber-KB	Meningkatnya pembinaan, kesetaraan, dan kemandirian ber-KB	1. Jumlah peserta KB baru miskin (KPS dan KS-I) dan rentan lainnya yang mendapatkan pembinaan dan alokon gratis melalui 23.500 klinik KB pemerintah dan swasta (juta) 2. Jumlah peserta KB aktif miskin (KPS dan KS-I) dan rentan lainnya yang mendapatkan pembinaan dan alokon gratis melalui 23.500 klinik KB pemerintah dan swasta (juta)	3,75	3,80	3,89	3,97	4,05	4.378,2	BKKBN
				11,9	12,2	12,5	12,8	13,1		
5	Peningkatan Kemandirian Ber-KB Keluarga Pra-S dan KS-1	Meningkatnya pembinaan dan kemandirian ber-KB keluarga Pra-S dan KS-1	1. Jumlah PUS anggota Kelompok Usaha Ekonomi Produktif yang menjadi peserta KB mandiri 2. Jumlah mitra kerja yang memberikan bantuan modal dan pembinaan kewirausahaan kepada kelompok Usaha Ekonomi Produktif 3. Jumlah mitra kerja yang menjadi pendamping kelompok Usaha Ekonomi Produktif	22.000	44.000	66.000	88.000	110.000	135,72	BKKBN
				34	34	34	34	34		
				3	3	3	3	3		
6	Kegiatan Penyediaan Subsidi Pendidikan SD/SDLB Berkualitas	Tersalurkannya subsidi pendidikan bagi siswa SD/SDLB	Jumlah siswa SD/SDLB sasaran beasiswa miskin	2.767.282	3.916.220	3.640.780	3.370.200	3.103.210	59.599,1*)	Kemendiknas
7	Kegiatan Penyediaan Subsidi Pendidikan SMP/SMPLB	Tercapainya keluasan dan pemerataan akses SMP bermutu dan berkesetaraan jender di semua kabupaten dan kota	Jumlah siswa SMP/SMPLB sasaran beasiswa miskin	966.064	1.395.100	1.346.020	1.275.840	1.195.700	31.512,2*)	Kemendiknas
8	Kegiatan Penyediaan dan Peningkatan Pendidikan SMA	Tercapainya perluasan dan pemerataan akses pendidikan	Jumlah siswa SMA sasaran beasiswa miskin	378.783	501.898	614.396	714.653	800.000	6.530,6 *)	Kemendiknas

No	SUBSTANSI INTI /KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PAGU (Rp. Milyar) TOTAL	K/L
				2010	2011	2012	2013	2014		
		SMA bermutu, berkesetaraan gender, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat di semua kabupaten dan kota								
9	Kegiatan Penyediaan dan Peningkatan Pendidikan SMK	Tercapainya perluasan dan pemerataan akses pendidikan SMK bermutu, berkesetaraan gender dan relevan dengan kebutuhan masyarakat di semua kabupaten dan kota	Jumlah siswa SMK sasaran beasiswa miskin	305.535	390.476	475.417	560.358	645.298	9.243,0 *)	Kemendiknas
10	Kegiatan Penyediaan Layanan Kelembagaan	Tersedianya keluasaan dan pemerataan akses PT yang bermutu dan berdaya saing internasional	Jumlah mahasiswa penerima beasiswa miskin	65.000	67.000	67.000	69.000	70.000	5.211,3*)	Kemendiknas
11	Penyediaan Subsidi Pendidikan Madrasah Bermutu	Tersedianya beasiswa miskin MI, MTs, dan MA	1. Jumlah siswa miskin penerima beasiswa miskin MI 2. Jumlah siswa miskin penerima beasiswa miskin MTs 3. Jumlah siswa miskin penerima beasiswa miskin MA	640.000 540.000 320.000	640.000 540.000 320.000	640.000 540.000 320.000	640.000 540.000 320.000	640.000 540.000 320.000	1.152,0 1.944,0 1.216,0	Kemen Agama
12	Penyediaan Subsidi Pendidikan Tinggi Islam	Tersedianya beasiswa mahasiswa miskin	Jumlah beasiswa miskin penerima beasiswa PTA	59.538	59.538	59.538	59.538	59.538	788,5	Kemen Agama
13	Bantuan Tunai Bersyarat	Terlaksananya pemberian bantuan Tunai Bersyarat bagi RTSM (PKH);	Jumlah RTSM yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/PKH;	816 ribu RTSM	1.116 ribu RTSM	1.516 ribu RTSM	1.404 ribu RTSM	1.170 ribu RTSM	8.985,0	Kemensos
14	Penyediaan subsidi beras untuk masyarakat miskin	Penyediaan beras untuk seluruh rumah tangga sasaran dengan	Jumlah RTS penerima RASKIN (dengan 15 kg per RTS selama 12 bulan)	17,5 juta					11.800,0	Kemenko Kesra/ Perum

No	SUBSTANSI INTI/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PAGU (Rp. Milyar) TOTAL	K/L
				2010	2011	2012	2013	2014		
	(RASKIN)	jumlah yang memadai dalam 1 tahun								Bulog
15	Pengelolaan Pertanahan Provinsi	Terwujudnya redistribusi tanah	Terlaksananya redistribusi tanah (bidang)	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000	912,70	BPN
16	Pengembangan dan Peningkatan Perluasan Kesempatan Kerja	Tersedianya pekerjaan untuk sementara waktu bagi penganggur dan terbangunnya sarana fisik yang dibutuhkan masyarakat	Jumlah penganggur yang mempunyai pekerjaan sementara	24.000 orang	90.000 orang	90.000 orang	90.000 orang	90.000 orang	856,7	Kemnakertrans
			Jumlah kabupaten/kota yang menyelenggarakan program pengurangan pengangguran sementara	231 Kab/Kota	360 Kab/Kota	360 Kab/Kota	360 Kab/Kota	360 Kab/Kota		
17	Peningkatan Perlindungan Pekerja Perempuan dan Penghapusan Pekerja Anak	Memfasilitasi pekerja anak untuk kembali ke dunia pendidikan atau memperoleh pelatihan keterampilan Berkurangnya jumlah anak yang bekerja pada bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak	Jumlah pekerja anak yang ditarik dari BPTA	3.000	4.300	5.600	6.900	8.400	212,1	Kemnakertrans
			Persentase pekerja anak yang ditarik dari BPTA yang dikembalikan ke dunia pendidikan dan/atau memperoleh pelatihan keterampilan	100%	100%	100%	100%	100%		
2. PNPM MANDIRI: Penambahan anggaran PNPM Mandiri dari Rp 10,3 triliun pada 2009 menjadi Rp 12,1 triliun pada 2010, pemenuhan Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Rp 3 milyar per kecamatan untuk minimal 30% kecamatan termiskin di perdesaan, dan integrasi secara selektif PNPM Pendukung										
1	Pengaturan, Pembinaan, dan Pengawasan dalam Penataan Bangunan dan Lingkungan Termasuk Pengelolaan Gedung dan Rumah Negara serta Penyelenggaraan Bangunan Gedung dan Penataan	Pemberdayaan masyarakat dan percepatan penanggulangan kemiskinan & pengangguran di kelurahan/ kecamatan (PNPM Perkotaan)	Jumlah kelurahan/desa yang mendapatkan pendampingan pemberdayaan sosial	8.500 desa di 1.094 kec.	7.482 desa di 805 kec.	4.968 desa di 460 kec.	552 desa di 460 kec.	482 desa di 460 kec.	5.980,0	Kemen PU

No	SUBSTANSI INTI /KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PAGU (Rp. Milyar) TOTAL	K/L
				2010	2011	2012	2013	2014		
	Kawasan/Lingkungan Permukiman									
2	Peningkatan Kemandirian Masyarakat Perdesaan (PNPM-MP)	Pemberdayaan masyarakat dan percepatan penanggulangan kemiskinan & pengangguran di kecamatan dan desa (PNPM-Perdesaan)	1. Cakupan penerapan PNPM-MP dan Penguatan PNPM 2. Cakupan wilayah kegiatan rekonstruksi dan rehabilitasi pasca bencana krisis di Kab. Nias dan Nias Selatan	4.791 kec 2 kab/9 kec.	4.940 kec	4.943 kec	4.946 kec	4.949 kec	48.781,3 39,8	Kemendagri
3	Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan dan Penyelenggaraan dalam Pengembangan Permukiman	237 kecamatan (RISE) Percepatan penanggulangan kemiskinan melalui pembangunan infrastruktur & pemberdayaan masyarakat desa (RIS PNPM+PPIP)	1. Jumlah kecamatan yang dilayani oleh infrastruktur pendukung kegiatan ekonomi dan sosial 2. Jumlah desa tertinggal yang terbangun prasarana dan sarana lingkungan permukiman	237 3.900	237 2.450	237 1.237	237 1.237	237 1.226	1.188,0 3.198,0	Kemen PU
4	Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, Pengembangan Sumber Pembiayaan dan Pola Investasi, serta Pengelolaan Pengembangan Sanitasi Lingkungan	210 kab/kota (SANIMAS)	Pembangunan prasarana dan sarana air limbah dengan sistem <i>on-site</i> (kab/kota)	30 kab/kota system on-site	35 kab/kota system on-site	40 kab/kota system on-site	50 kab/kota system on-site	55 kab/kota system on-site	331,0	Kemen PU
5	Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, Pengembangan Sumber Pembiayaan dan Pola Investasi, serta Pengembangan Sistem	4.650 desa (PAMSIMAS)	Jumlah desa yang terfasilitasi	1.472	1.165	500	700	813	4.224,0	Kemen. PU

No	SUBSTANSI INTI/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PAGU (Rp. Milyar) TOTAL	K/L
				2010	2011	2012	2013	2014		
	Penyediaan Air Minum									
6	Pelayanan Usaha dan Pemberdayaan Masyarakat	Meningkatnya keberdayaan dan kemandirian 2 juta usaha skala mikro di seluruh kawasan minapolitan pesisir, beroperasinya sarana usaha mikro di 300 kabupaten/kota pesisir, dan 1 unit BLU pembiayaan.	Jumlah kelompok usaha mikro di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang <i>bankable</i>						1.300,6	KKP
			1. Pengembangan sarana usaha mikro LKM	100 unit	100 unit	100 unit	100 unit	100 unit		
			2. Dana Pemberdayaan Masyarakat Desa/PNPM MK	120 kab/kota	120 kab/kota	120 kab/kota	120 kab/kota	120 kab/kota		
			3. Tenaga pendamping	480 orang	480 orang	480 orang	480 orang	480 orang		
			4. Kelompok Usaha Mikro	800.000 usaha	800.000 usaha	800.000 usaha	800.000 usaha	800.000 usaha		
7	Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) dan Penguatan Kelembagaan Ekonomi Perdesaan melalui LM3	Peningkatan realisasi penyaluran kredit program (KKP-E dan KUR), pembiayaan komersial, pembiayaan syariah, pengembangan sentra usaha pertanian perdesaan, dan pengembangan Gapoktan PUAP	1. Realisasi penyaluran kredit program untuk pertanian (KKP-E dan KUR) 2. Realisasi penyaluran pembiayaan Syariah dan pembiayaan komersial untuk sektor pertanian 3. Jumlah sentra-sentra usaha pertanian di perdesaan 4. Jumlah Gapoktan PUAP (unit)	1,5 triliun 4 triliun 200 10.000	2 triliun 5 triliun 200 10.000	2 triliun 6 triliun 200 10.000	2 triliun 7 triliun 200 10.000	2,5 triliun 8 triliun 200 10.000	4.500,0	Kementan
8	Pengembangan Kebijakan, Koordinasi dan Fasilitasi Penguatan Kelembagaan Pemerintah Daerah Tertinggal (P2DTK/SPADA) – PNPM	Meningkatnya pemulihan dan pertumbuhan sosial ekonomi daerah-daerah tertinggal	Jumlah kab, kec dan desa daerah tertinggal	51 kab, 186 kec, 4.596 desa	80 kab **)	80 kab **)	80 kab **)	80 kab **)	2.491,1 **)	KPDT
9	Peningkatan PNPM Mandiri Bidang Pariwisata	Meningkatnya jumlah desa wisata melalui PNPM bidang pariwisata	Jumlah desa wisata	200	450	550	450	350	406,0	Kemen Budpar

No	SUBSTANSI INTI/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PAGU (Rp. Milyar) TOTAL	K/L
				2010	2011	2012	2013	2014		
3. KREDIT USAHA RAKYAT (KUR): Pelaksanaan penyempurnaan mekanisme penyaluran KUR mulai 2010 dan perluasan cakupan KUR mulai 2011										
1	Dukungan Penjaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR)	Tersedianya anggaran penjaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR)	Persentase tersedianya anggaran penjaminan KUR	100%	100%	100%	100%	100%	10.000,0	Kemenkeu (Anggaran 99)
2	Koordinasi Kebijakan Kredit Usaha Rakyat (KUR)	Meningkatnya koordinasi kebijakan Kredit Usaha Rakyat (KUR)	Persentase rekomendasi kebijakan KUR yang terimplementasikan	60%	65%	70%	75%	80%	3,1	Menko Perekonomian
Akses Usaha Mikro dan Kecil kepada Sumber Permodalan										
3	Perluasan pelayanan kredit/ pembiayaan bank bagi koperasi dan UMKM, yang didukung pengembangan sinergi dan kerja sama dengan lembaga keuangan/ pembiayaan lainnya.	Meningkatnya jangkauan pelayanan kredit/pembiayaan bank bagi koperasi dan UMKM.	1. Kerja sama pembiayaan yang melibatkan bank dan lembaga keuangan/ pembiayaan lainnya.	5 MOU	5 MOU	5 MOU	5 MOU	5 MOU	8,2	Kemeneg KUKM
			2. Terasilitasinya Lembaga Penjaminan Kredit Daerah (LPKD) yang melakukan co-guarantee dengan lembaga penjaminan nasional	7 Prov	8 Prov	9 Prov	10 Prov	10 Prov	15,7	Kemeneg KUKM
			3. Jumlah Koperasi yang dapat mengakses kredit/ pembiayaan bank melalui linkage	100	100	100	100	100	1,8	Kemeneg KUKM
			4. Jumlah LKM (koperasi dan BPR) yang melakukan kerjasama pembiayaan dengan Bank	100	100	100	100	100	5,0	Kemeneg KUKM
			5. Jumlah Lembaga Penjaminan Kredit Daerah	2	2	2	3	3	10,0	Kemeneg KUKM
4	Peningkatan peran lembaga keuangan bukan bank, seperti KSP/KJKS, perusahaan	Meningkatnya kapasitas dan jangkauan lembaga keuangan bukan bank untuk menyediakan	Jumlah lembaga pembiayaan bukan bank yang dibentuk.	100 KSP/KJKS	100 KSP/KJKS 1 LMVD	100 KSP/KJKS 1 LMVD	100 KSP/KJKS	100 KSP/KJKS	13,1	Kemeneg KUKM

No	SUBSTANSI INTI /KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PAGU (Rp. Milyar) TOTAL	K/L
				2010	2011	2012	2013	2014		
	modal ventura, anjak piutang, sewa guna usaha, pegadaian dalam mendukung pembiayaan bagi koperasi dan UMKM, disertai dengan pengembangan jaringan informasinya.	pembiayaan usaha bagi koperasi dan UMKM.		1 LMVD			1 LMVD	1 LMVD		
5	Peningkatan kapasitas kelembagaan dan kualitas layanan lembaga keuangan mikro (LKM), termasuk untuk akreditasi dan sertifikasi pelayanan LKM, termasuk LKM yang berbadan hukum koperasi.	1. Meningkatnya kapasitas kelembagaan LKM.	Jumlah LKM yang terdaftar dan terakreditasi sesuai ketentuan hukum tentang LKM.	100 LKM	100 LKM	100 LKM	100 LKM	100 LKM	2,5	Kemeneg KUKM
		2. Meningkatnya kapasitas dan kualitas layanan lembaga keuangan mikro (LKM).	1. Jumlah pengelola LKM yang mengikuti pelatihan.	-	1.000 pengelola LKM	1.000 pengelola LKM	1.000 pengelola LKM	1.000 pengelola LKM	4,0	Kemeneg KUKM
			2. Jumlah SDM Pengelola KSP/KJKS yang bersertifikat	1 200 org	1.200 org	1.200 Org	1.200 Org	1.200 Org	5,0	
			3. Jumlah LDP KJK dan TUK yang diperkuat	-	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	6,0	
			4. Jumlah Manajer/kepala cabang KJK yang diikutkan diklat dan sertifikasi kompetensi LKM	900 org	900 org	900 org	900 org	900 org	5,0	
Kelembagaan Koperasi										
6	Revitalisasi sistem pendidikan, pelatihan dan penyuluhan perkoperasian bagi anggota dan pengelola koperasi, serta calon anggota dan kader koperasi	Sistem pendidikan, pelatihan dan penyuluhan perkoperasian bagi anggota dan pengelola koperasi, serta calon anggota dan kader koperasi semakin efektif.	1. Jumlah peserta peningkatan pemahaman koperasi di kalangan masyarakat kelompok strategis.	1000 org	1000 org	1000 org	1000 org	1000 org	2,5	Kemeneg KUKM
			2. Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan	-	1750 org	1750 org	1750 org	1750 org	6,0	Kemeneg

No	SUBSTANSI INTI /KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PAGU (Rp. Milyar)	K/L
				2010	2011	2012	2013	2014	TOTAL	
			peningkatan pemahaman koperasi pada SDM koperasi.							KUKM
4. TIM PENANGGULANGAN KEMISKINAN: Revitalisasi Komite Nasional Penanggulangan Kemiskinan (KNPK) di bawah koordinasi Wakil Presiden, penggunaan unified database untuk penetapan sasaran program mulai 2009-2010, dan penerapan sistem monitoring dan evaluasi yang akurat sebagai dasar keputusan dan alokasi anggaran										
1	Koordinasi Pengarusutamaan Kebijakan dan Anggaran Penanggulangan Kemiskinan	Meningkatnya jumlah koordinasi, sinkronisasi, kajian serta pemantauan dan evaluasi kebijakan penanggulangan kemiskinan di bidang pengarusutamaan kebijakan dan anggaran	1. Jumlah kegiatan dan koordinasi kebijakan, sinkronisasi pelaksanaan, kajian kebijakan, pemantauan dan evaluasi penanggulangan kemiskinan di bidang pengarusutamaan kebijakan dan anggaran					10 kegiatan	15,1	Kemeko Kesra
2	Koordinasi Penguatan Kelembagaan TKPK	Meningkatnya jumlah koordinasi, sinkronisasi, kajian serta pemantauan dan evaluasi kebijakan penanggulangan kemiskinan di bidang penguatan kelembagaan TKPK	1. Jumlah dan persentase hasil kegiatan koordinasi kelembagaan TKPK 2. Jumlah dan persentase hasil kegiatan koordinasi pengendalian pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan					12 kegiatan	13,5	
3	Koordinasi Penguatan Masyarakat dan Kawasan	Meningkatnya jumlah koordinasi, sinkronisasi, kajian serta pemantauan dan evaluasi kebijakan penanggulangan kemiskinan di bidang penguatan masyarakat dan kawasan	1. Jumlah kegiatan koordinasi pelaksanaan kebijakan program pemberdayaan masyarakat 2. Jumlah sinkronisasi kebijakan program pemberdayaan masyarakat di bidang penguatan masyarakat dan kawasan					8 kegiatan	7,6	
4	Koordinasi Urusan Kelembagaan dan Kemitraan	Meningkatnya jumlah koordinasi, sinkronisasi, kajian serta pemantauan dan evaluasi	1. Jumlah kegiatan dan persentase pelaksanaan rekomendasi hasil koordinasi kebijakan penanggulangan kemiskinan di					5 kegiatan	17,1	

No	SUBSTANSI INTI/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PAGU (Rp. Milyar) TOTAL	K/L
				2010	2011	2012	2013	2014		
		kebijakan penanggulangan kemiskinan di bidang kelembagaan dan kemitraan	bidang kelembagaan dan kemitraan 2. Jumlah kegiatan dan persentase pelaksanaan rekomendasi sinkronisasi hasil kebijakan penanggulangan kemiskinan di bidang kelembagaan dan kemitraan							
5	Koordinasi Urusan Keuangan Mikro dan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Meningkatnya jumlah koordinasi, sinkronisasi, kajian serta pemantauan dan evaluasi kebijakan penanggulangan kemiskinan di bidang keuangan mikro dan pemanfaatan TTG	1. Jumlah pengusaha mikro yang telah mendapatkan kredit modal usaha 2. Jumlah kegiatan/lembaga hasil sinkronisasi pengembangan akses sumber pendanaan bagi usaha mikro 3. Jumlah kegiatan koordinasi pengembangan teknologi tepat guna bagi usaha mikro 4. Persentase pelaksanaan rekomendasi pembentukan LPDA-PK dan DME sebagai program pemberdayaan masyarakat dan usaha mikro					8 kegiatan	7,1	

Catatan:

1. *) merupakan angka program, bukan angka kegiatan
2. **) masih merupakan usulan dari kegiatan P2DTK Fase II

PRIORITAS 5	PROGRAM AKSI DI BIDANG PANGAN
TEMA PRIORITAS	<i>Peningkatan ketahanan pangan dan lanjutan revitalisasi pertanian untuk mewujudkan kemandirian pangan, peningkatan daya saing produk pertanian, peningkatan pendapatan petani, serta kelestarian lingkungan dan sumber daya alam. Peningkatan pertumbuhan PDB sektor pertanian sebesar 3,7% per tahun dan Indeks Nilai Tukar Petani sebesar 115-120 pada 2014</i>
PENANGGUNGJAWAB	Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
BEKERJASAMA DENGAN	Menteri Pertanian; Menteri Pekerjaan Umum; Menteri Komunikasi dan Informatika; Menteri Perhubungan; Menteri Perindustrian; Menteri Keuangan; Menteri Negara Riset dan Teknologi; Menteri Kesehatan; Menteri Negara Lingkungan Hidup; Kepala Badan Penerapan & Pengkajian Teknologi; Kepala Badan Pertanahan Nasional

No	SUBSTANSI INTI / KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					ANGGARAN (Miliar Rp)	K/L
				2010	2011	2012	2013	2014	Total	
1	Koordinasi Kebijakan Ketahanan Pangan	Meningkatnya Koordinasi Urusan Ketahanan Pangan	Presentase rekomendasi hasil koordinasi kebijakan bidang ketahanan pangan yang diimplementasikan	50%	60%	70%	80%	90%	19,45	Menko Perekonomian
2	Koordinasi Bidang Perkebunan dan hortikultura	Meningkatnya koordinasi Kebijakan Perkebunan dan Hortikultura	Presentase rekomendasi kebijakan Perkebunan dan Hortikultura yang diimplementasikan	85%	85%	90%	95%	100%	11,6	Menko Perekonomian
3	Koordinasi Bidang Pengembangan Urusan Perikanan dan Peternakan	Meningkatnya koordinasi Kebijakan	Presentase rekomendasi kebijakan bidang Pengembangan urusan perikanan dan peternakan yang diimplementasikan	85%	85%	90%	95%	100%	11,8	Menko Perekonomian

No	SUBSTANSI INTI / KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					ANGGARAN (Miliar Rp)	K/L
				2010	2011	2012	2013	2014	Total	
1. LAHAN, PENGEMBANGAN KAWASAN DAN TATA RUANG PERTANIAN:										
<i>Penataan regulasi untuk menjamin kepastian hukum atas lahan pertanian, pengembangan areal pertanian baru seluas 2 juta hektar, penertiban serta optimalisasi penggunaan lahan terlantar</i>										
a. Penataan regulasi untuk menjamin kepastian hukum atas lahan pertanian										
1	Pengembangan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Pertanahan dan Hubungan Masyarakat	Terlaksananya pengembangan peraturan perundang-undangan bidang pertanahan dan Hubungan Masyarakat	Jumlah paket rancangan peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang pertanahan dalam rangka mendukung pelaksanaan Undang-undang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan	1	1	1	1	1	19,34	BPN
2	Penataan ruang dan perencanaan pengelolaan wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil	Tersedianya 145 rencana zonasi nasional/ provinsi/ kabupaten/ kota, 50 masterplan minapolitan, 30 masterplan kluster pulau-pulau kecil bernilai ekonomi tinggi serta 12 master plan kawasan sentra produksi kelautan	Jumlah kawasan laut dan pesisir yang memiliki peta potensi dan arahan pemanfaatan yang terintegrasi, akuntabel dan terkini	6	9	11	13	11	481,11	KKP
			Jumlah kawasan pulau-pulau kecil yang memiliki peta potensi dan arahan pemanfaatan yang terintegrasi, akuntabel dan terkini	23	28	33	33	28		
b. Pengembangan areal pertanian baru seluas 2 juta hektar										
1	Perluasan areal pertanian	Meningkatnya luasan areal baru lahan pertanian dalam mendukung peningkatan produksi pertanian	Luasan (Ha) perluasan areal Tanaman pangan (sawah dan lahan Kering), hortikultura, perkebunan Dan kawasan peternakan	32.505	519.570	483.965	482.600	481.360	13.085,81	Kementan
c. Penertiban, serta optimalisasi penggunaan lahan terlantar.										
1	Pengembangan pengelolaan lahan pertanian	Meningkatnya produktivitas lahan pertanian, dan prasarana Jalan Usaha Tani/Jalan Produksi serta pengendalian lahan untuk mendukung peningkatan produksi pertanian	Luasan (Ha) lahan yang dioptimasi, Dikonservasi dan direhabilitasi, direklamasi (Pengembangan rumah kompos)	25.709	67.813	76.675	74.790	74.648	2.892,48	Kementan

No	SUBSTANSI INTI / KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					ANGGARAN (Miliar Rp)	K/L
				2010	2011	2012	2013	2014	Total	
2. INFRASTRUKTUR:										
<i>Pembangunan dan pemeliharaan sarana transportasi dan angkutan, pengairan, jaringan listrik, serta teknologi komunikasi dan sistem informasi nasional yang melayani daerah-daerah sentra produksi pertanian demi peningkatan kuantitas dan kualitas produksi serta kemampuan pemasarannya</i>										
a. Pembangunan dan pemeliharaan sarana transportasi dan angkutan yang melayani daerah-daerah sentra produksi pertanian demi peningkatan kuantitas dan kualitas produksi serta kemampuan pemasarannya										
1	Pengembangan pengelolaan lahan pertanian	Meningkatnya produktivitas lahan pertanian, dan prasarana Jalan Usaha Tani/Jalan Pro-duksi serta pengendalian lahan	Tersedianya jalan sepanjang 12.500 km untuk JUT dan jalan produksi, serta tersedianya data bidang tanah petani yang layak disertifikasi	952	3.481	2.867	2.600	2.600	804,02	Kementan
2	Pengembangan pembangunan dan pengelolaan pelabuhan perikanan	Meningkatnya pembangunan dan pencapaian standar pelayanan prima di pelabuhan perikanan dengan fasilitas penunjang produksi, pengolahan, pemasaran dan kesyahbandaran yang sesuai standar.	Jumlah pelabuhan perikanan dengan fokus pembangunan di lingkaran luar dan daerah perbatasan yang potensial	968 unit	973 unit	978 unit	983 unit	988 unit	6.084,77	KKP
			Jumlah pelabuhan perikanan yang mempunyai Wilayah Kerja Operasional Pelabuhan Perikanan (WKOPP)	10	20	30	40	50		
3	Pembinaan dan pengembangan kapal perikanan, alat penangkapan ikan dan pengawakan kapal perikanan	Terwujudnya kecukupan kapal perikanan yg laik laut, laik tangkap dan laik simpan, alat tangkap ikan (sesuai SNI) dan pengawakan yang standar di setiap WPP	Jumlah & jenis kapal penangkap ikan yang memenuhi standar laik laut, laik tangkap dan laik simpan	500 unit	550 unit	600 unit	650 unit	700 unit	384,03	KKP
			Jumlah alat penangkap ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang memenuhi standar	600 unit	976 unit	1,552 unit	2,259 unit	2,929 unit		
			Jumlah awak kapal perikanan yang memenuhi standar kompetensi	60 orang	120 orang	180 orang	210 orang	240 orang		
b. Pembangunan dan pemeliharaan pengairan yang melayani daerah-daerah sentra produksi pertanian demi peningkatan kuantitas dan kualitas produksi										
1	Pengelolaan air untuk pertanian	Meningkatnya ketersediaan air irigasi dalam mendukung	Tersedianya unit pengembangan sumber air alternatif skala kecil yang berfungsi.	1.005	1.520	1.520	1.520	1.520	3.649,71	Kementan

No	SUBSTANSI INTI / KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					ANGGARAN (Miliar Rp)	K/L
				2010	2011	2012	2013	2014	Total	
			Tersedianya optimasi pemanfaatan Air irigasi melalui perbaikan JI-TUT/JI-DES dan pengembangan TAM yang berfungsi (ha)	108.486	497.434	490.000	485.000	479.080		
			Tersedianya (unit) pengembangan Konservasi air (melalui pengembangan Embung, cek dam, sumur resapan, Antisipasi kekeringan dan banjir)	464	4.378	4.524	4.651	4.782		
2	Pengembangan sistem prasarana dan sarana pembudidayaan ikan	Kawasan perikanan budidaya yang memiliki prasarana dan sarana sesuai kebutuhan	Luas lahan (Ha) budidaya sesuai target produksi disertai data potensi yang akurat	1.115.666 Ha	1.167.666 Ha	1.226.666 Ha	1.291.666 Ha	1.365.416 Ha	667,45	KKP
			Data potensi kawasan yang akurat	70	90	100	130	150		
3	Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	Meningkatnya kualitas dan cakupan layanan pada 2,55 juta hektar daerah irigasi; 1,21 juta daerah rawa dan pemanfaatan air tanah untuk irigasi seluas 44,89 ribu hektar	Luas layanan jaringan irigasi yang meningkat (ha)	115 ribu	1 ribu	2,4 ribu	4,5 ribu	6,5 ribu	2.924,50	Kemen. PU
			Luas layanan jaringan irigasi yang direhabilitasi (ha)	200 ribu	300 ribu	375 ribu	255 ribu	210 ribu	13.000,00	
			Luas layanan jaringan irigasi yang dioperasikan dan dipelihara (ha)	2,315 juta	2,315 juta	2,315 juta	2,315 juta	2,315 juta	2.000,00	
			Luas layanan jaringan rawa yang meningkat (Ha)	10 ribu					60,00	
			Luas layanan jaringan rawa yang direhabilitasi (Ha)	85 ribu	100 ribu	105 ribu	110 ribu	50 ribu	1.700,00	
			Luas layanan jaringan rawa yang dioperasikan dan dipelihara (ha)	800 ribu	900 ribu	1 juta	1,1 juta	1,2 juta	1.000,00	
			Jumlah sumur air tanah yang dibangun / ditingkatkan (unit)	70					77,00	
			Jumlah sumur air tanah yang direhabilitasi (unit)	230	300	350	450	545	615,80	

No	SUBSTANSI INTI / KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					ANGGARAN (Miliar Rp)	K/L		
				2010	2011	2012	2013	2014	Total			
			Jumlah sumur air tanah yang dioperasikan dan dipelihara (unit)	425	440	442	442	443	219,20			
			Luas layanan jaringan tata air tambak yang dibangun / ditingkatkan (ha)	1.000					7,50			
			Luas layanan jaringan tata air tambak yang direhabilitasi (ha)	4.000	42.000	42.000	43.000	44.000	525,00			
4	Pengelolaan dan Konservasi Waduk, Embung, Situ serta Bangunan Penampung Air Lainnya	Meningkatnya ketersediaan dan terjaganya kelestarian air dengan kapasitas 12,0 miliar m3	Jumlah waduk yang dibangun:						6.481,29	Kemen. PU		
			• waduk selesai dibangun	1		1	3	6				
			• embung/ situ selesai dibangun	20	34	35	44	25				
											1.845,25	
			• waduk dalam pelaksanaan	5	5	8	7	1				
			Jumlah waduk yang direhabilitasi									
			• Jumlah waduk selesai direhabilitasi	2	2	8	5	12				
• waduk dalam pelaksanaan rehabilitasi	9	13	17	12	-							
• Embung/ situ selesai direhabilitasi	37	50	60	69	82							
			Jumlah waduk/embung/situ yang diperasikan dan dipelihara	182	179	176	172	166	1.320,00			
c. Pembangunan dan pemeliharaan teknologi komunikasi dan system informasi nasional yang melayani daerah-daerah sentra produksi pertanian demi peningkatan kuantitas dan kualitas produksi serta kemampuan pemasarannya												
1	Pelaksanaan Pemberdayaan dan Pemerataan Pembangunan Sarana dan Prasarana Informatika	Layanan komunikasi dan informatika di wilayah non komersial	• Prosentase desa yang dilayani akses telekomunikasi	100%	100%	100%	100%	100%	3.163,70	Kemenkominfo		
			• Prosentase desa yang dilayani akses internet	5%	20%	40%	60%	80%				
3. PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN:												
Peningkatan upaya penelitian dan pengembangan bidang pertanian yang mampu menciptakan benih unggul dan hasil penelitian lainnya menuju kualitas dan produktivitas hasil pertanian nasional yang tinggi												
1	Penelitian Dan Pengembangan Peternakan Dan Veteriner	Meningkatkan Inovasi Teknologi Peternakan dan Veteriner Mendukung Program	Jumlah rekomendasi pembangunan peternak & veteriner, disemi nasi, promosi, publikasi	10	10	10	10	10	511,32	Kementan		

No	SUBSTANSI INTI / KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					ANGGARAN (Miliar Rp)	K/L
				2010	2011	2012	2013	2014	Total	
		Percepatan Produksi Swasembada Daging Sapi (P2SDS)	Jumlah SDG peternak-an, TPT dan veteriner yang dikonservasi dan dikarakterisasi	112	112	112	112	112		
			Jumlah galur baru ternak dan TPT yang dihasilkan	6	6	8	8	8		
			Jumlah inovasi peternak-an, TPT dan veteriner yang dihasilkan dan dialihkan/didesiminasiikan kepada pengguna	22	24	22	22	25		
2	Penelitian dan pengembangan tanaman pangan	Peningkatan inovasi teknologi tanaman pangan mendukung ketahanan dan kemandirian pangan yang mencakup padi, sereal, kacang-kacangan dan umbi-umbian,	Jumlah varietas unggul baru	5 – 6	5 – 6	8 – 9	10 – 12	14 – 15	657,28	Kementan
			Jumlah teknologi budidaya, panen dan pasca panen primer	5	5	8	7	8		
			Jumlah akses sumberdaya sistem (SDG) teridentifikasi, terkoleksi dan terkonservasi sifat varietas	800	800	800	800	800		
			Jumlah produksi benih sumber (BS, FS) padi, sereal, kacang-kacangan & umbi-umbian dengan SMM ISO 9001-2000	BS 10 ton FS 20 ton	BS 10 ton FS 20 ton	BS 15 ton FS 20 ton	BS 15 ton FS 20 ton	BS 15 ton FS 20 ton		
3	Penelitian dan Pengembangan hortikultura	Meningkatnya inovasi teknologi tan. Hortikultura mendukung pengembangan kawasan hortikultura	Jumlah VUB yg diminati konsumen	40	131	235	414	1032	377,29	Kementan
			Jumlah PN yang terkonservasi dan dikarakterisasi	20 Bw, 455 acc, 3925	600 acc 3978	600 acc 4020	600 acc 4060	600 acc 4100		
			Jumlah benih sumber :							
			Sayuran	20.000 GO 20 ton	22.000 GO 25 ton	24.000 GO 16 ton	26.000 GO 35 ton	28.000 GO 40 ton		
				14335 batang	15035 batang	16000 batang	17200 batang	18700 batang		
			VUB buah trop dan sub trop	960		960		960		
			Akses mutasi buah trop	151800	960	253100	960	254000		

No	SUBSTANSI INTI / KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					ANGGARAN (Miliar Rp)	K/L
				2010	2011	2012	2013	2014	Total	
			Planlet, benih, stek tan hias		202400		253700			
			Jumlah benih bt bwh dan bt atas hsl SE	100000	500000	1000000	2500000	5000000		
			Jumlah teknologi prod hortikultura ramah lingkungan	12	12	12	12	12		
4	Penelitian dan pengembangan tanaman perkebunan	Peningkatan inovasi tek. Tan. Perkebunan untuk mening-katkan produktivitas, diversifikasi dan nilai tambah tan. Perkebunan	Jumlah varietas/klon unggul tanaman perkebunan	10	10	10	12	15	579,83	Kementan
			Jumlah teknologi untuk peningkatan produktivitas tanaman perkebunan	42	47	47	52	52		
			Jumlah produk olahan tanaman perkebunan	20	24	24	29	33		
5	Penelitian dan pengembangan bioteknologi dan sumber daya system pertanian	Peningkatan inovasi dan adopsi hasil bioteknologi dan pemanfaatan sumberdaya system pertanian (SDGP) untuk mendukung ketahanan pangan dan peningkatan daya saing produk pertanian	Jumlah akses SDGP dan database yang dikonservasi atau diremajakan	2250 akses; 4 dtbase	2250 akses; 4 dtbase	2250 akses; 4 dtbase	2250 akses; 4 dtbase	2250 akses; 4 dtbase	173,13	Kementan
			Jumlah varietas atau galur harapan padi, kedelai, dan jagung berproduktivitas tinggi dan berumur genjah	51 galur kedelai dan padi; 3 populasi baru padi; 6 galur transgenik	Keragaman 50 galur kedelai; 5 Galur transgenik (FUT)	50 galur harapan kedelai; 5 Galur transgenik (FUT)	1 var. unggul padi baru; 5 Galur transgenik (LUT)	5 Galur transgenik (LUT)		
			Jumlah galur harapan gandum tropis		Galur gandum transgenik ZmDre	Galur gandum adaptif iklim	Galur gandum adaptif iklim LUT	Galur gandum adaptif iklim LUT		

No	SUBSTANSI INTI / KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					ANGGARAN (Miliar Rp)	K/L
				2010	2011	2012	2013	2014	Total	
					b2A					
			Jumlah galur padi dan jagung efisien penggunaan pupuk sintetik	125 galur calon hibrida jagung unggul	20-35 galur hibrida jagung adaptif kondisi pupuk rendah	8-10 galur hibrida jagung harapan dan padi harapan	2 Galur harapan jagung hibrida dan padi transgenik	2-4 varietas unggul hibrida jagung Galur padi transgenik		
			Jumlah biofertilizer untuk padi dan tebu	20 isolat potensial biofertilizer	20 isolat potensial biofertilizer	3 formula bahan pembawa	2 biofertilizer padi	1 biofertilizer tebu		
			Jumlah tanaman manggis dan durian tanpa biji	2 metode regenerasi dan transformasi	2 metode transformasi dan perbanyakan akan	2 jenis tanaman transgenik putatif	2 jenis tanaman transgenik	Bahan sambungan		
			Jumlah peta gen sifat-sifat penting pada kelapa sawit, jarak pagar dan sapi	7 sekuens whole genom	258 sekuens DNA target	3 sistem kit dan peta gen				

No	SUBSTANSI INTI / KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					ANGGARAN (Miliar Rp)	K/L
				2010	2011	2012	2013	2014	Total	
6	Pengembangan Sistem Informasi dan Peningkatan sistem Pengawasan Keamanan Hayati	Kebijakan teknis pengawasan keamanan hayati yang efektif dalam operasional pengawasan keamanan hayati hewani dan Nabati; dan sistem informasi yang optimal dalam mendukung operasional Program Barantan	Jumlah Rumusan Kebijakan teknis operasional peng-awasan keamanan hayati	2	2	2	2	2	70,00	Kementan
			Tingkat kesiapan infrastruktur sistem informasi Barantan	40%	50%	75%	80%	90%		
			Prosentase peningkatan akses informasi melalui jaringan ke pusat data Barantan	25%	50%	50%	50%	25%		
7	Penelitian dan pengembangan pascapanen pertanian	Meningkatnya inovasi teknologi pascapanen dan pengembangan produk hasil pertanian	Jumlah teknologi penanganan segar produk hortikultura	5	4	4	4	2	93,28	Kementan
			Jumlah produk diversifikasi pangan dan substitusi pangan impor	6	6	6	6	8		
			Produk baru dengan peningkatan nilai tambah	2	4	6	8	10		
8	Pengawasan dan penerapan teknologi terapan adaptif perikanan budidaya	Sentra produksi perikanan budidaya dengan komoditas unggulan dan teknologi inovatif.	Persentase unit usaha yang mendapatkan pelayanan sertifikasi sesuai standar dengan informasi yang akurat.	100%	100%	100%	100%	100%	1.109,55	KKP
9	Penelitian dan pengembangan IPTEK perikanan tangkap	Wilayah perairan yang teridentifikasi potensi produksi, karakteristik, kebutuhan konservasi SDInya	Jumlah rekomendasi pengelolaan	6 buah	6 buah	4 buah	4 buah	3 buah	413,00	KKP
10	Penelitian dan pengembangan IPTEK perikanan budidaya	HKI, rekomendasi, inovasi teknologi dan produk biologi yang meningkatkan efisiensi produksi, ragam, kualitas dan keamanan komoditas unggulan.	Jumlah rekomendasi, ragam varietas baru/unggul, kualitas dan keamanan komoditas unggulan	5	5	5	5	5	434,4	KKP
11	Penelitian dan Pengembangan IPTEK Pengolahan Produk dan Bioteknologi Kelautan dan Perikanan	HKI, rekomendasi serta inovasi teknologi dan bioteknologi yang meningkatkan efisiensi pengolahan secara optimal, ragam, nilai tambah, kualitas dan keamanan produk unggulan/ prospektif.	Jumlah HKI, rekomendasi serta inovasi teknologi dan bioteknologi yang meningkatkan efisiensi pengolahan secara optimal, ragam, nilai tambah, kualitas dan keamanan produk unggulan/ prospektif.	Paket Teknologi : 3	HKI : 1 Paket Teknol ogi: 3	Paket Teknol ogi: 3	HKI : 1 Rekom endasi : 1 Paket Teknol ogi: 3	Paket Teknol ogi: 4	241,93	KKP

No	SUBSTANSI INTI / KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					ANGGARAN (Miliar Rp)	K/L
				2010	2011	2012	2013	2014	Total	
12	Litbang Ketahanan Pangan	Kebijakan peningkatan dukungan litbang untuk ketahanan pangan khususnya pengembangan pupuk ekologis dan benih unggul-adaptif terhadap lingkungan sub-optimal, teknologi panen, teknologi pengelolaan lahan marginal untuk produksi pangan,	Jumlah kebijakan	3	3	3	3	3	50,0	KRT
			Jumlah riset bersama	4	4	4	4	4		
13	Litbang Benih Unggul Berbasis Biologi Molekuler	Benih unggul berbasis biologi molekuler	Jumlah varietas Benih unggul	1	2	2	3	4	45,00	LIPI
	Litbang pupuk organik dari mikroba hayati Indonesia	Pupuk organik dari mikroba hayati Indonesia	Percontohan produksi pupuk organik di pedesaan	1						
			Aplikasi pupuk organik pada paket <i>biovillage</i>		1	1	10	10		
Litbang keanekaragaman pangan	Keanekaragaman pangan	Jumlah varietas	2	2	2	2	2			
14	Penelitian Bioteknologi Peternakan Modern	Terbangunnya fasilitas litbang bioteknologi peternakan modern	Fasilitas Laboratorium dan peralatannya	2	1				25,0	LIPI
			Paket pengembangan program biotek peternakan			1	1	1		
15	Pengembangan Aplikasi Teknologi Isotop dan Radiasi	Peningkatan upaya penelitian dan pengembangan bidang pertanian yang mampu menciptakan benih unggul dan hasil penelitian lainnya menuju kualitas dan produktivitas hasil pertanian nasional yang tinggi.	varietas padi (padi sawah, padi gogo, padi dataran tinggi dan padi hibrida)		1	1	2	3	21,00	BATAN
			varietas kedelai (jenis biji besar, genjah, produksi tinggi dan jenis biji hitam)	1		1	1	1		
			varietas kacang tanah dan kacang hijau			1		1		
			varietas gandum tropis dan sorghum	1	1	2		2		
16	Pengembangan dan Penerapan Teknologi Pupuk Berimbang	Termanfaatkannya teknologi pupuk berimbang untuk mendukung ketahanan pangan	Survei pilot plant	1					79,00	BPPT
			Pilot project, pengujian		3					
			Pilot plant, biofer-tilizer			3				
			Pengujian, alih tekn				3			
			Rekomendasi					1		

No	SUBSTANSI INTI / KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					ANGGARAN (Miliar Rp)	K/L
				2010	2011	2012	2013	2014	Total	
4. INVESTASI, PEMBIAYAAN, DAN SUBSIDI: <i>Dorongan untuk investasi pangan, pertanian, dan industri perdesaan berbasis produk lokal oleh pelaku usaha dan pemerintah, penyediaan pembiayaan yang terjangkau, serta sistem subsidi yang menjamin ketersediaan benih varietas unggul yang teruji, pupuk, teknologi dan sarana pasca panen yang sesuai secara tepat waktu, tepat jumlah, dan terjangkau</i>										
a. Dorongan untuk investasi pangan, pertanian, dan industri perdesaan berbasis produk yste oleh pelaku usaha dan pemerintah										
1	Pengelolaan produksi tanaman sereal	Meningkatnya perluasan penerapan budidaya tanaman sereal yang tepat dan berkelanjutan untuk peningkatan produksi melalui peningkatan produktivitas per satuan luas.	Penerapan budidaya sereal yang tepat dan berkelanjutan (ribu ha) :	2650,2	2975,25	3200,3	3475,35	3750,4	2.258,97	Kementan
			SLPTT padi non hibrida (ribu ha)	2000	2200	2300	2400	2500		
			SLPTT padi hibrida (ribu ha)	200	250	300	400	500		
			SLPTT Padi lahan kering (ribu ha)	300	350	400	450	500		
			SLPTT Jagung hibrida (ribu ha)	150	175	200	225	250		
			Peningkatan area produ ksi gandum (ribu ha)	0,1	0,13	0,15	0,18	0,2		
			Peningkatan area produ ksi sorghum (ribu ha)	0,1	0,13	0,15	0,18	0,2		
			Peta sentra produksi sereal (paket)	1	1	1	1	1		
			Data luas tanam komoditas sereal	1	1	1	1	1		
2	Pengelolaan produksi tanaman kacang-kacangan dan umbi-umbian	Meningkatnya perluasan penerapan budidaya tanaman kacang-kacangan dan umbi-umbian yang tepat dan berkelanjutan untuk peningkatan produksi melalui peningkatan produktivitas per satuan luas.	Penerapan budidaya (ribu ha) :	319,29	426,56	536,98	662,43	742,91	1.256,50	Kementan
			SLPTT kedelai (ribu ha)	250	300	350	425	500		
			SLPTT kacang tanah (ribu ha)	50	100	150	200	200		
			SLPTT kacang hijau (ribu ha)	-	10	20	20	25		
			PTT kacang hijau (ribu ha)	3,21	-	-	-	-		
			PTT ubi kayu (ribu ha)	6,53	6,54	6,56	6,58	6,61		
			PTT ubi jalar (ribu ha)	9,5	9,96	10,35	10,76	11,2		
			PTT pangan lokal (ribu ha)	0,05	0,06	0,08	0,09	0,1		
			Peta sentra produksi Kabi (paket)	1	1	1	1	1		

No	SUBSTANSI INTI / EGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					ANGGARAN (Miliar Rp)	K/L
				2010	2011	2012	2013	2014	Total	
			Data luas tanam komoditas Kabi (paket)	1	1	1	1	1		
3	Pengelolaan sistem penyediaan benih tanaman pangan	Pembinaan lembaga perbenihan tanaman pangan yang efisien dan berkelanjutan di lokasi penerapan budi-daya tanaman pangan yang tepat	Lembaga perbenihan tanaman pangan yang dibina di lokasi penerapan budidaya tanaman pangan yang tepat :						334,00	Kementan
			BPSBTPH (Balai)	32	32	32	32	32		
			BBI (Balai)	31	31	31	31	31		
4	Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Buah Berkelanjutan	Berkembangnya sistem agribisnis yang mampu menyediakan produk buah yang cukup, bermutu dan aman konsumsi	Laju pertumbuhan produksi tanaman buah	0,05	0,053	0,055	0,056	0,056	429,94	Kementan
			Proporsi produk buah bermutu di pasar	0,2	0,25	0,32	0,4	0,5		
5	Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Sayuran dan Biofarmaka Berkelanjutan	Berkembangnya sistem agribisnis yang mampu menyediakan produk sayuran dan biofarmaka yang cukup, bermutu dan aman konsumsi	Laju pertumbuhan produksi Tanaman Sayuran dan Biofarmaka	3,5%	3,8%	3,8%	4,2%	4,2%	442,04	Kementan
			Laju pertumbuhan luas panen Tanaman sayuran dan biofarmaka	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%		
6	Pengembangan sistem perbenihan, pupuk dan sarana produksi lainnya	Peningkatan usaha/pro-dusen benih, pupuk dan sarana produksi lainnya guna mendukung keberlanjutan ketersediaan produk hortikultura yang berdaya saing.	% jumlah usaha/produsen benih hortikultura						312,85	Kementan
			Benih buah (%)	3	3	3	3	3		
			Benih sayur umbi (%)	2	2	2	2	2		
			Benih sayur biji (%)	1	1	1	1	1		
			Benih tanaman hias (%)	2	2	2	2	2		
% penggunaan benih bermutu										
buah (%)										
sayur umbi (%)	60	65	70	75	80					
benih sayur biji (%)	17	19.5	22	24.5	30					
				75.2	76.6	78.1	79.5	80.9		

No	SUBSTANSI INTI / KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					ANGGARAN (Miliar Rp)	K/L
				2010	2011	2012	2013	2014	Total	
7	Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman semusim	Terfasilitasinya pengembangan budidaya tanaman semusim (tebu, kapas, tembakau dan nilam)	Capaian luas areal (ribu hektar) pembinaan dan pengembangan tanaman semusim (tebu, kapas, nilam, tembakau, dan aneka tanaman semusim lainnya) (Intensifikasi, diversifikasi, rehabilitasi dan ekstensifikasi)	-	-	-	-	-	251,81	Kementan
			Swasembada Gula Nasional							
			Ø Tebu	465	509	553	597	641		
			Pengembangan Komoditas Pemenuhan Konsumsi Dalam Negeri							
			Ø Kapas	15	18	20	24	25		
			Pengembangan Komoditas Ekspor							
			Ø Tembakau	205	205	205	205	205		
Ø Nilam	14	15	16	17	18					
8	Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman rempah dan penyegar	Terfasilitasinya pengembangan budidaya tanaman rempah dan penyegar (kopi, teh, kakao, lada, cengkeh)	Peningkatan luas areal (ribu hektar) pembinaan dan pengembangan tanaman rempah dan penyegar (kopi, teh, kakao, lada, cengkeh dan aneka tanaman rempah dan penyegar lainnya) (Intensifikasi, diversifikasi, rehabilitasi dan ekstensifikasi):						254,57	Kementan
			Pengembangan Komoditas Ekspor							
			Ø Kopi	1291	1308	1328	1331	1354		
			Ø Teh	129	130	130	130	130		
			Ø Kakao	1655	1746	1837	1929	2020		
			Ø Lada	192	193	194	195	196		
			Pengembangan Komoditas Pemenuhan Konsumsi Dalam Negeri							
			Ø Cengkeh	465	469	474	479	484		

No	SUBSTANSI INTI / KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					ANGGARAN (Miliar Rp)	K/L
				2010	2011	2012	2013	2014	Total	
			Gerakan Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao Nasional (ribu ha)							
			Rehabilitasi	81,85	93,15	15,00	15,00	10,00		
			Intensifikasi	30,55	49,45	15,00	20,00	20,00		
			Peremajaan	22,60	27,40	5,00	5,00	5,00		
			Pengendalian OPT	135,00	170,00	35,00	40,00	35,00		
			Pemberdayaan petani (kelompok Tani)	6750,00	8500,00	1750,00	2000,00	1750,00		
9	Dukungan penyediaan benih unggul bermutu dan sarana produksi perkebunan	Terfasilitasinya penyediaan benih unggul bermutu	Ø Jumlah penggunaan benih unggul bermutu	45	48	52	55	60	169,41	Kementan
10	Peningkatan kuantitas dan kualitas benih dan bibit dengan mengoptimalkan sumber daya lokal	Peningkatan kualitas & kuantitas benih dan bibit ternak	Peningkatan kuantitas semen (dosis)	2.700	3.050	3.400	3.700	4.000	1.020,96	Kementan
		Penguatan kelembagaan perbibitan dgn Good Breeding Practices	· Peningkatan produksi embrio	400	490	580	640	700		
		Penerapan standar mutu benih dan bibit ternak	ibit sapi	2625	3068	3354	3666	4150		
		Penerapan teknologi perbibitan	· Bibit unggas lokal	60.000	60.600	70.800	77.400	84.800		
		Pengembangan usaha dan investasi perbibitan	· Bibit Kambing/domba	2.000	2.020	2.030	2.580	2.820		
10	Peningkatan produksi ternak ruminansia dengan pendayagunaan sumber daya lokal	Meningkatnya populasi dan produksi ternak ruminansia	Pengembangan ternak potong (ekor)	21.000	23.760	26.136	28.750	31.625	1.749,69	Kementan
			Pengembangan sapi perah (ekor)	1.250	1.375	1.513	1.664	1.830		
			Pengembangan Integrasi tanaman ternak (unit)	75	83	91	100	110		
			Pengembangan alsin ternak ruminansia	425	468	514	566	622		
12	Peningkatan produksi ternak	Meningkatnya populasi dan produksi, serta	Pengembangan kelompok unggas lokal	230	290	350	410	470	611,40	Kementan

No	SUBSTANSI INTI / KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					ANGGARAN (Miliar Rp)	K/L
				2010	2011	2012	2013	2014	Total	
	non ruminansia dengan pendayagunaan sumber daya lokal	meningkatnya penda-yagunaan sumber daya lokal ternak non ruminansia	Pengembangan kelompok non unggas	28	45	58	65	72		
			Pengembangan pakan ternak	25	35	50	60	70		
			Pengembangan alsin ternak	50	45	45	45	45		
13	Pelayanan perizinan dan investasi	Peningkatan penerima- an penyiapan bahan analisa, fasilitas proses teknis permohonan ijin, pendaftaran di bidang pupuk, pestisida dan alat mesin pertanian, benih/bibit, produk ternak dan pangan segr serta penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi	Jumlah ijin usaha perta-nian, ijon pemasukan/ pengeluaran benih/bibit, obat hewan dan pakan ternak, produk ternak dan agensi hayati, serta rekomendasi produk pangan	2.500	2.850	4.200	4.500	5.000	51,71	Kementan
			Bahan informasi dan bahan kebijakan pengembangan investasi pertanian	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	12,43	
14	Pengembangan mutu dan standarisasi pertanian	Meningkatnya mutu dan keamanan pangan hasil pertanian	Jumlah usaha pasca panen dan pengolahan yang menerapkan sistem jaminan mutu.	330 unit	330 unit	330 unit	330 unit	330 unit	303,00	Kementan
				+ 54 unit organik	+ 54 unit organik	+ 54 unit organik	+ 54 unit organik	+ 54 unit organik		
			Jumlah pengujian mutu alat mesin pertanian	42 sertifikat	42 sertifi- t	42 sertifi- t	42 sertifi- t	42 sertifi- t		
15	Pengembangan pengolahan hasil pertanian	Berkembangnya pengolahan hasil pertanian yang berkelanjutan	Jumlah usaha pengolah-an hasil pertanian yang bernilai tambah dan berdaya saing	11.200 .	3.400	3.600	3.800	4.000	777,50	Kementan
16	Pengembangan pemasaran internasional	Meningkatnya pemasaran internasional hasil pertanian	Meningkatnya jumlah ekspor hasil pertanian	15%	15%	15%	15%	15%	278,50	Kementan
			Meningkatnya jumlah surplus neraca perdagangan hasil pertanian	30%	30%	30%	30%	30%		
17	Pengembangan penanganan pasca panen pertanian	Meningkatnya penanganan pasca panen hasil pertanian	Jumlah kelompok tani (poktan/gapoktan) yg menerapkan penanganan pasca panen sesuai GHP dan standar mutu	1.800	1.980	2.160	2.340	2.520	328,80	Kementan
18	Pemantapan sistem penyuluhan	Meningkatkan mutu penyelenggaraan	Jumlah kelembagaan penyuluhan pertanian yang terbentuk		245	345	410	458	4.202,41	Kementan

No	SUBSTANSI INTI / KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					ANGGARAN (Miliar Rp)	K/L
				2010	2011	2012	2013	2014	Total	
	pertanian	penyuluhan pertanian	Jumlah kelembagaan petani (gapoktan)		28.304	38.304	51.304	63.304		
			Jumlah BPP model		336	350	380	425		
			Jumlah tenaga penyuluh pertanian yang berkualitas (orang)		27.393	36.000	45.000	55.000		
			Persentase jumlah kegiatan yang mendukung penyelenggaraan penyuluhan pertanian		30	50	65	80		
19	Peningkatan Kualitas Pelayanan karantina Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati.	Pelayanan karantina pertanian dan pengawasan keamanan hayati yang efektif	Vol. dan frek. Operasional Karantina pertanian dan pengawasan keamanan hayati	350 rb	400 rb	420 rb	450 rb	450 rb	1.476,40	Kementan
			Tingkat kesesuaian tindakan karantina dan operasional pengawasan keamanan hayati.	100%	100%	100%	100%	100%		
			Tingkat penurunan NNC (Notification of Non Compliance)	50%	50%	50%	50%	50%		
			Peningkatan Indeks kepuasan dan kepatuhan pengguna jasa	75%	80%	85%	90%	90%		
20	Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan laboratorium Uji Standar Karantina Pertanian	Penyelenggaraan laboratorium yang berkualitas dalam mendukung efektifitas penilaian dan pengendalian resiko ditempat pemasukkan dan pengeluaran	Jml ujicoba teknik dan metoda tindakan karantina dan pengawasan keamanan hayati	4	5	5	5	5	99,30	Kementan
			Jumlah sampel lab. yang diperiksa sesuai ruang lingkup pengujian (Uji Standar, rujukan, konfirmasi dan profisiensi)	5.000	6.000	7.200	8.000	8.000		
			Jumlah laboratorium karantina yang diakreditasi	4	6	2	2	2		
21	Pengembangan sistem usaha pembudidayaan ikan	Kawasan potensi perikanan budidaya menjadi kawasan Minapolitan dengan usaha yang bankable.	Jumlah kelompok usaha perikanan budidaya yang memenuhi standar kelembagaan dan jumlah tenagakerja yang memiliki kompetensi.	157 kelompok 394 orang	788 kelompok 1.182 orang	1.576 kelompok 1.892 orang	1.957 kelompok 1.970 orang	3.388 kelompok 2.364 orang	466,36	KKP
			Jumlah usaha perikanan budidaya yang memperoleh SNI serta jumlah lembaga sertifikasi yang terakreditasi	936 unit usaha 19 Lab uji 3 LSSM	1.203 unit usaha 26 Lab	1.826 unit usaha 33 Lab	3.061 unit usaha 36 Lab	4.948 unit usaha 43 Lab		

No	SUBSTANSI INTI / KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					ANGGARAN (Miliar Rp)	K/L
				2010	2011	2012	2013	2014	Total	
				(lembaga sertifikat sistem mutu)	uji 4 LSSM	uji 7 LSSM	uji 11 LSSM	uji 15 LSSM		
22	Pengembangan sistem produksi pembudidayaan ikan	Meningkatnya produksi perikanan budidaya dengan mutu terjamin dan data akurat.	Jumlah produksi perikanan budidaya air tawar (juta ton)	1,4	1,8	2,5	3,4	4,6	620,84	KKP
			Jumlah produksi perikanan budidaya air payau. (ton)	1.137.920	1.322.280	1.587.640	1.831.620	2.022.220		
			Jumlah produksi perikanan budidaya laut	2.846.475 ton	3.703.400 ton	5.348.850 ton	7.780.675 ton	10.288.175 ton		
			Jumlah usaha perikanan budidaya yang bersertifikat	1.000 unit	2.000 uni	4.000 unit	7.000 unit	7.000 unit		
23	Pengembangan usaha penangkapan ikan dan pemberdayaan nelayan skala kecil	Terbangunnya kawasan potensi perikanan tangkap yang menjadi kawasan Minapolitan dengan usaha yang bankable serta realisasi investasi usaha perikanan tangkap.	Jumlah kawasan yang memiliki Kelompok Usaha Bersama (KUB)	1 PP 5 PPI	1 PP 5 PPI	1 PP 5 PPI	1 PP 5 PPI	1 PP 5 PPI	454,08	KKP
			Jumlah KUB yang Mandiri.	999 KUB	1.200 KUB	1.500 KUB	1.800 KUB	2.000 KUB		
			Jumlah usaha perikanan tangkap yang layak dan <i>bankable</i>	999 KUB	1.200 KUB	1.500 KUB	1.800 KUB	2.000 KUB		
24	Fasilitasi pengembangan industri pengolahan hasil perikanan	Meningkatnya volume produk olahan hasil perikanan dengan kemasan dan mutu terjamin	Jumlah sarana prasara-na pengolahan (lokasi)	58	66	72	78	84	245,46	KKP
			Jumlah sentra pengolahan (lokasi)	5	5	5	5	5		
			Volume produksi dari UKM (juta ton)	2,3	2,4	2,5	2,7	2,8		

No	SUBSTANSI INTI / KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					ANGGARAN (Miliar Rp)	K/L
				2010	2011	2012	2013	2014	Total	
25	Pelayanan Usaha Perikanan Tangkap yang efisien, tertib, dan berkelanjutan	Meningkatnya pelayanan prima dan ketertiban usaha perikanan tangkap sesuai ketersediaan SDI di setiap WPP secara akuntabel dan tepat waktu	Jumlah keabsahan dan kelengkapan dokumen usaha perikanan tangkap	8.000 SIUP, SIPI/SIKP I	9.000 SIUP, SIPI/SI KPI	10.000 SIUP, SIPI/SI KPI	11.000 SIUP, SIPI/SI KPI	12.000 SIUP, SIPI/SI KPI	200,86	KKP
		Jumlah pelaku usaha perikanan tangkap yang memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Jumlah pelaku usaha perikanan tangkap yang memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan yang berlaku	2.500	3.000	3.500	4.000	4.500		
		Jumlah kapal dan jenis alat penangkap ikan yang diperbolehkan sesuai dengan ketersediaan sumberdaya ikan di setiap WPP	Jumlah kapal dan jenis alat penangkap ikan yang diperbolehkan sesuai dengan ketersediaan sumberdaya ikan di setiap WPP	4.900 SIPI	5.900 SIPI	6.900 SIPI	7.900 SIPI	8.900 SIPI		
26	Fasilitasi pembinaan dan pengembangan sistem usaha dan investasi perikanan	Meningkatnya jumlah nilai investasi (PMA dan PMDN)	Jumlah unit I perikanan yang memenuhi standar ketenagakerjaan sesuai SKKNI	430 UPI	430 UPI	860 UPI	1.280 UPI	860 UPI	244,93	KKP
27	Fasilitasi penguatan dan pengembangan pemasaran luar negeri hasil perikanan	Meningkatnya jumlah pangsa pasar ekspor perikanan	Jumlah penambahan negara tujuan ekspor	3	3	4	4	5	94,12	KKP
28	Penyuluhan kelautan dan perikanan	Meningkatnya kawasan potensi perikanan yang memiliki kelompok pela-ku utama yang mandiri dalam mengembangkan usaha perikanan	Jumlah kelompok potensi perikanan yang disuluh	300 Kelompok di 50 kawasan	400 kelompok di 60 kawasan	500 kelompok di 70 kawasan	600 kelompok di 80 kawasan	700 kelompok di 90 kawasan	447,07	KKP
29	Pelatihan kelautan dan perikanan	Terselenggaranya pelatihan yang sesuai standar kompetensi dan kebutuhan pasar	Jumlah lulusan pelatihan yang sesuai standar serta jumlah lulusan yang meningkat kerjanya sesuai standar kompetensi dan kebutuhan pasar	6.160 masyarakat 1.103 aparatur	8000 masyarakat 1.300 aparatur	10000 masyarakat 1.600 aparatur	12000 masyarakat 1900 aparatur	15000 masyarakat 2200 aparatur	347,55	KKP

No	SUBSTANSI INTI / KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					ANGGARAN (Miliar Rp)	K/L
				2010	2011	2012	2013	2014	Total	
30	Revitalisasi Industri Pupuk	Fasilitasi pembangunan restrukturisasi 1 pabrik	Persen kemajuan	20%	40%	60%	80%	100%	35,00	Kemenperin
		Fasilitasi pembangunan restrukturisasi 5 pabrik urea baru	Persen kemajuan	20%	40%	60%	80%	100%		
		Fasilitasi pembangunan restrukturisasi 5 pabrik pupuk NPK	Persen kemajuan	20%	40%	60%	80%	100%		
31	Revitalisasi Industri Gula	(1)Restrukturisasi 3 industri permesinan untuk pendukung PG	Pabrik	20%	40%	60%	80%	100%	9,00	Kemenperin
		(2)Otomatisasi 19 PG								
		(3) Perpres tentang ke-bijakan terpadu revita-lisasi PG, koordinator kelembagaan	Fasilitasi pembangunan pabrik gula baru	Pabrik	10	10	10	10		
b. Penyediaan pembiayaan yang terjangkau										
1	Penyusunan dan penyampaian laporan keuangan belanja subsidi dan belanja lain-lain (BSBL)	Tersusunnya laporan keuangan BSBL yang transparan dan akuntabel	Laporan Keuangan belanja subsidi lain-lain (BSBL) yang lengkap dan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	18,04	Kemenkeu
2	Pengelolaan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat (ABPP)	Terlaksananya kebijakan penganggaran yang transparan dan akuntabel	1. Pengalokasian belanja pemerintah pusat yang tepat waktu dan efisien	100%	100%	100%	100%	100%	36,47	Kemenkeu
			2. Penyediaan anggar secara tepat waktu dan tepat jumlah untuk menunjang program di bidang pangan, pertanian, dan industri perdesaan sesuai dengan persetujuan	100%	100%	100%	100%	100%		
			3. PMK No.261/2008 tentang tata cara penyediaan anggaran, perhitungan, pembayaran, dan pertanggungjawaban subsidi pupuk	-	40%	60%	80%	100%		

No	SUBSTANSI INTI / KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					ANGGARAN (Miliar Rp)	K/L
				2010	2011	2012	2013	2014	Total	
			4. Dokumen RAPBN-P 2010 tentang perubahan system pengelolaan pendanaan BLU Tanah dan <i>Land Capping</i> untuk ditampung dalam APBN-P 2010	100%	-	-	-	-		
			5. Peraturan pelaksanaan anggaran R&D berdasarkan program prioritas K/L yang bersangkutan sesuai dengan alokasi anggaran dalam APBN	100%	-	-	-	-		
c. Sistem subsidi yang menjamin ketersediaan benih varietas unggul yang teruji, pupuk, teknologi dan sarana pasca panen yang sesuai secara tepat waktu, tepat jumlah, dan terjangkau.										
1	Penyaluran subsidi benih tanaman pangan	Tersalurnya benih tanaman pangan bersubsidi	Jumlah benih tanaman pangan bersubsidi (ribu ton)	178,18	211,99	217,55	222,19	226,92		Kementan
2	Penyaluran pupuk bersubsidi	Tersalurnya pupuk bersubsidi	Jumlah pupuk bersubsidi (juta ton)	11,06	11,32	11,6	11,89	12,2		Kementan
3	Pengembangan sistem perbenihan ikan	Terpenuhinya kebutuhan benih untuk produksi dan pasar dengan mutu terjamin dan data akurat.	Jumlah produksi induk unggul (ekor, berat, unit kebun bibit)	6,5 juta; 267.280 ton; 2.784 unit	8 juta; 350.42 0 ton; 3.650 unit	10,1 juta; 510.00 0 ton; 5.312 unit	12,6 juta; 750.00 0 ton; 7.812 unit	15 juta; 1.juta ton; 10.417 unit	534,33	KKP
			Jumlah unit perbenihan yang bersertifikat	51 unit	63 unit	78 unit	96 unit	116 unit		
5. PANGAN DAN GIZI: <i>Peningkatan Kualitas Gizi dan Keanekaragaman Pangan Melalui Pola Pangan Harapan</i>										
1	Penjaminan pangan asal hewan yang aman dan halal serta pemenuhan persyaratan produk hewan non pangan	Penguatan peran dan fungsi lembaga otoritas veteriner	Jumlah kebijakan kesmavet (pedoman)	25	27	29	30	31	1.059,73	Kementan
		Kesadaran masyarakat akan resiko residu dan cemaran pada produk hewan serta zoonosis terbangun.	Jumlah produk hewan pangan dan non pangan (RPU,RPH,RPB,TPU,KIOS DAGING,TPS) yang memenuhi standar	169	210	260	310	400		

No	SUBSTANSI INTI / KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					ANGGARAN (Miliar Rp)	K/L
				2010	2011	2012	2013	2014	Total	
		Peningkatan penerapan kesrawan di RPH/RPU	Jumlah lab yang dibina (unit)	35	41	41	41	41		
2	Pengembangan ketersediaan dan penanganan rawan pangan.	Meningkatnya pemantapan ketersediaan pangan dan penanganan rawan pangan.	Jumlah Desa Mandiri Pangan yang dikembangkan.	1.750 Desa	2.550 Desa	3.350 Desa	4.150 Desa	5.000 Desa	982,60	Kementan
			Jmlh Lumbung Pangan yang dikembangkan.	800 Lb	1.225 Lb	1.650 Lb	2.075 Lb	2.500 Lb		
			Lokasi Rawan Pangan.	350 Kab	400 Kab	450 Kab	450 Kab	450 Kab		
			Tersedianya Data dan	33 Prop	33 Prop	33 Prop	33 Prop	33 Prop		
			Pemantauan dan pemantapan ketersediaan dan kerawanan pangan.	33 Prop	33 Prop	33 Prop	33 Prop	33 Prop		
3	Pengembangan Sistem Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan.	Meningkatnya pemantapan distribusi dan harga pangan.	Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM)	750 Gap	1.000 Gap	1.250 Gap	1.500 Gap	2.000 Gap	798,70	Kementan
			tersedianya data dan informasi tentang distribusi, harga dan akses pangan.	33 Prop	33 Prop	33 Prop	33 Prop	33 Prop		
			terlaksananya pemantauan dan pemantapan distribusi, harga dan akses pangan.	33 Prop	33 Prop	33 Prop	33 Prop	33 Prop		
4	Pengembangan penganeekaragaman konsumsi pangan dan peningkatan keamanan pangan segar	Meningkatnya pemantapan penganeekaragaman konsumsi pangan dan keamanan pangan	Desa P2KP (Percepatan penganeekaragaman konsumsi pangan).	2.000 Desa	4.000 Desa	6.000 Desa	8.000 Desa	10.000 Desa	994,34	Kementan
			Promosi penganeekaragaman man konsumsi pangan dan keamanan pangan	383 Pusat/ Prop/ Kab	434 Pusat/ Prop/ Kab	484 Pusat/ Prop/ Kab	484 Pusat/ Prop/ Kab	484 Pusat/ Prop/ Kab		

No	SUBSTANSI INTI / KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					ANGGARAN (Miliar Rp)	K/L
				2010	2011	2012	2013	2014	Total	
			Penanganan keamanan pangan tingkat produsen dan konsumen	33 Prop	363 Prop/ Kab	396 Prop/ Kab	429 Prop/ Kab	429 Prop/ Kab		
			Terlaksananya pemantauan dan pemantapan penganeekaragaman konsumsi pangan dan keamanan pangan	33 Prop	33 Prop	33 Prop	33 Prop	33 Prop		
			Tersedianya data dan informasi tentang pola konsumsi, penganeke-ragaman dan keamanan pangan.	33 Prop	33 Prop	33 Prop	33 Prop	33 Prop		
5	Fasilitasi pengembangan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan	Meningkatnya unit penanganan, pengolahan dan distribusi hasil perikanan yang memperoleh sertifikasi sesuai standar nasional dan internasional	Jumlah laboratorium ser-tifikasi dgn sarana prasa rana yang memadai	17 lab	22 lab	12 lab	18 lab	20 lab	233,8	KKP
			Jumlah unit yang mem-peroleh SNI dan persya-ratan internasional	179 SNI	199 SNI	219 SNI	239 SNI	259 SNI		
			Jumlah lab uji mutu hasil perikanan yang terakre-ditasi KAN	17 lab	22 lab	12 lab	18 lab	20 lab		
			Jumlah Unit Pengolahan Ikan (UPI) & hasil peri-kanan yg bersertifikat	424 UPI	429 UPI 611 sertifik	434 UPI	439 UPI	444 UPI		
6	Fasilitasi penguatan dan pengembangan pemasaran dalam negeri hasil perikanan	Meningkatnya jumlah desa yang memiliki pasar yang mampu memfasilitasi penjualan hasil perikanan dan tingkat konsumsi ikan	Jumlah pelelangan ikan dan pasar ikan yang berfungsi sesuai standar	18 TPI 7.061 pasar	36 TPI 7000 pasar	54 TPI 7000 pasar	72 TPI 7000 pasar	91 TPI 7000 pasar	590,85	KKP
			Jumlah lokasi pelaksa-naan kegiatan Gemarikan	33 provinsi	33 provinsi	33 provinsi	33 provinsi	33 provinsi		
7	Pengembangan dan Pembinaan Perkarantinaan Ikan		Persentase media pembawa hama penyakit ikan impor, ekspor dan antar area yang bebas hama penyakit ikan karantina dengan laboratorium karantina yang sesuai standar OIE dan SNI	63.34%	70 %	75%	80%	83.34%	1.702,0	KKP

No	SUBSTANSI INTI / KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					ANGGARAN (Miliar Rp)	K/L
				2010	2011	2012	2013	2014	Total	
8	Pembinaan Gizi Masyarakat	Meningkatnya kualitas penanganan masalah gizi masyarakat	Prosentase balita ditimbang berat badannya (D/S)	65	70	75	80	85	2.804,2	Kemkes
6. ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM: <i>Pengambilan langkah-langkah kongkrit terkait adaptasi dan antisipasi sistem pangan dan pertanian terhadap perubahan iklim</i>										
1	Penelitian Dan Pengembangan Sumberdaya Lahan Pertanian	Tersedianya data, informasi dan peningkatan inovasi teknologi pengelolaan sumberdaya lahan pertanian	Tersedianya peta potensi sumberdaya lahan pertanian	2,5 juta ha di Sulawesi	2,5 juta ha di Sulawesi dan NTT	3,5 juta ha di Maluku dan Papua	3,5 juta ha di Papua	3,5 juta ha di Papua	295,10	Kementan
			Paket komponen teknologi pengelolaan SDL	12 paket	12 paket	12 paket	11 paket	11 paket		
2	Peningkatan Produksi Ternak Ruminansia dengan pendayagunaan sumberdaya lokal	Meningkatnya populasi dan produksi hasil olahan ternak ruminansia terkait dengan Dampak Perubahan Iklim	Pemanfaatan kotoran ternak menjadi pupuk organik dan pemberian paket bantuan sosial pupuk organik (rumah kompos) (Dampak Perubahan Iklim)	-	10000	10000	10000	10000	669,00	Kementan
			Pengembangan dan pembinaan Biogas Asal Ternak Bersama Masyarakat (BATAMAS) terutama di sentra terpencil dan padat ternak (unit) (Dampak Perubahan Iklim)	100	150	200	250	300		
			Pengembangan integrasi ternak dan tanaman melalui pengelolaan kotoran ternak (padat & cair) menjadi pupuk organik dan pengolahan limbah tanaman untuk ternak terutama di sentra perkebunan, tanaman pangan dan horti kulture (klp) (Dampak Perubahan Iklim)	75	83	91	100	110		
3	Pengembangan Pengelolaan lahan pertanian	Meningkatnya produktivitas lahan pertanian, dan prasarana Jalan Usaha Tani/Jalan Produksi serta pengendalian lahan untuk mendukung peningkatan	Terlaksananya Pengembangan System of Rice intensification (SRI) (paket)	62	538	600	500	300	87,21	Kementan

No	SUBSTANSI INTI / KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					ANGGARAN (Miliar Rp)	K/L
				2010	2011	2012	2013	2014	Total	
		produksi pertanian								
4	Pengembangan sistem kesehatan ikan dan lingkungan pembudidayaan ikan	Kawasan perikanan budidaya yang sehat serta produk perikanan yang aman dikonsumsi.	Jumlah laboratorium uji yang memenuhi standar teknis.						678,33	KKP
			Lab kualitas air (unit)	25	31	38	43	48		
			Lab HPI (unit)	20	24	28	32	35		
			Lab Residu (unit)	9	11	14	18	25		
			Jumlah kawasan perikanan budidaya yang sehat serta persentase jenis biota perairan yang dikonservasi.	35 kab	350 kab	400 kab	350 kab	450 kab		
5	Pengelolaan sumber daya ikan	Meningkatnya Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) yang terjamin ketersediaan sumber daya ikan dengan data dan pengelolaan pemanfaatan yang terintegrasi, akuntabel dan tepat waktu.	• Jumlah lokasi pemantauan dan evaluasi perlindungan dan pengkayaan SDI	6 prov	33 prov	33 prov	33 prov	33 prov	354,6	KKP
			• Jumlah ekosistem PUD yang teridentifikasi	8 prov	8 prov	8 prov	8 prov	8 prov		
			• Jumlah perairan teritorial dan kepulauan yang teridentifikasi sumber dayanya	1 WPP	11 WPP	11 WPP	11 WPP	11 WPP		
			• Jumlah ZEEI yang teridentifikasi sumber dayanya	11 prov	4 prov	4 prov	4 prov	4 prov		

PRIORITAS 6	PROGRAM AKSI DI BIDANG INFRASTRUKTUR
TEMA PRIORITAS	<i>Pembangunan infrastruktur nasional yang memiliki daya dukung dan daya gerak terhadap pertumbuhan ekonomi dan sosial yang berkeadilan dan mengutamakan kepentingan masyarakat umum di seluruh bagian negara kepulauan Republik Indonesia dengan mendorong partisipasi masyarakat</i>
PENANGGUNGJAWAB	Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
BEKERJASAMA DENGAN	Menteri Pekerjaan Umum; Menteri Dalam Negeri; Menteri Kehutanan; Menteri Pertanian; Menteri Komunikasi dan Informatika; Menteri Perhubungan; Menteri Negara Perumahan Rakyat; Kepala Badan Pertanahan Nasional; Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal

NO	SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITYAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PAGU (RP MILIAR)	K/L
				2010	2011	2012	2013	2014	TOTAL	
				1. TANAH DAN TATA RUANG: Konsolidasi kebijakan penanganan dan pemanfaatan tanah untuk kepentingan umum secara menyeluruh di bawah satu atap dan pengelolaan tata ruang secara terpadu						
1	Pengelolaan Pertanahan Propinsi	Terlaksananya pengaturan dan penataanpenguasaan dan pemilikan tanah, serta pemanfaatan dan penggunaan tanah secara optimal.	Neraca Penatagunaan Tanah di daerah	100 kab/kota	100 kab/kota	100 kab/kota	100 kab/kota	100 kab/kota	54,94	BPN
2	Pengelolaan Pertanahan Propinsi	Terlaksananya pengaturan dan penataanpenguasaan dan pemilikan tanah, serta pemanfaatan dan penggunaan tanah secara optimal.	Inventarisasi P4T	335,67 ribu bidang	335,67 ribu bidang	335,67 ribu bidang	335,67 ribu bidang	335,67 ribu bidang	366,31	BPN
3	Pengembangan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Pertanahan dan Hubungan Masyarakat	Terlaksananya pengembangan peraturan perundang-undangan bidang pertanahan dan Hubungan Masyarakat	Tersusunnya peraturan perundangan pengadaan tanah untuk kepentingan umum	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	10,41	BPN
4	Perencanaan, Pemanfaatan, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Nasional termasuk Melakukan Koordinasi dan Fasilitasi Proses Penetapan Dokumen-dokumen yang dihasilkan	Keserasian dan keselarasan program pembangunan yaitu program dalam RTRWN, RTR Pulau, RTR KSN, RTR PKN, PKSN	Jumlah rencana tata ruang yang telah disinkronkan program pembangunanya	33	33	33	33	33	1143,58	Kemen. PU

NO	SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PAGU (RP MILIAR)	K/L
				2010	2011	2012	2013	2014	TOTAL	
5	Pemetaan Dasar Rupabumi dan Tata Ruang	Tersusunnya kebijakan pemetaan dasar rupabumi dan meningkatnya jumlah cakupan peta rupabumi Indonesia	Jumlah Nomor Lembar Peta (NLP) Peta Rupabumi skala 1:10.000 (Sumatera dan selatan Jawa).	90	226	118	135	155	32,0	Bakosurtanal
			Jumlah NLP Peta Rupabumi skala 1:50.000 wilayah gap	160	631	201	231	267	411,5	
			Jumlah NLP Peta Rupabumi skala 1:250.000 wilayah gap	0	10	20	20	10	48,0	
			Jumlah NLP gasetir dan model penataan ruang provinsi	400	400	400	400	400	9,3	
6	Pemetaan dasar kelautan dan kedirgantaraan	Tersusunnya kebijakan pemetaan dasar kelautan dan kedirgantaraan serta meningkatnya cakupan peta dasar kelautan dan kedirgantaraan	Survei batimetri lepas pantai line km	13.680	13.680	13.680	13.680	13.680	21.4	Bakosurtanal
			Jumlah liputan data spasial bathimetri, Pantai (LPI) dalam ln km	34.000	50.000	55.000	60.000	66.000	34.6	
			Percepatan Survei Hidrografi pantai multibeam line km	30.000	40.000	45.000	50.000	60.000	16.1	
			Jumlah NLP Peta LPI skala 1:25K, 1:50K, 1:250K dan LLN 1:500K	52	55	56	62	67	11.0	
			Pembuatan Peta LBI	2	2	3	4	4	3.3	

NO	SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PAGU (RP MILIAR)	K/L
				2010	2011	2012	2013	2014	TOTAL	
			Pembuatan peta navigasi udara (Aeronautical Chart)	8	9	10	12	12	5,6	
7	Pembangunan Infrastruktur Data Spasial	Tersusunnya rancangan rumusan kebijakan teknis, rencana dan program di bidang pembangunan Infrastruktur Data Spasial	Jumlah simpul jaringan di pusat	14	0	0	0	0	0,8	Bakosurtanal
			Jumlah simpul jaringan di prov.	6	6	6	6	4	4,8	
			Jumlah simpul jaringan di kab/ kota.	50	70	110	120	130	16,4	
			Jumlah dokumen SNI kab/kota	12	12	12	12	12	13,5	
			Jumlah metadata simpul jaringan pusat.	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,5	
			Jumlah metadata simpul jaringan provinsi.	3,000	3,000	3,000	3,000	1,000	3,5	
			Jumlah metadata simpul jaringan kab/kota	4,000	4,000	4,000	4,000	3,000	6,4	
			Jumlah pembangunan dan pengembangan penghubung simpul	1	1	1	1	1	36,2	
			Jumlah dokumen pembangunan dan pengembangan IDSN	1	1	1	1	1	795,3	

NO	SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITYAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PAGU (RP MILIAR)	K/L
				2010	2011	2012	2013	2014	TOTAL	
				2. JALAN: Penyelesaian pembangunan Lintas Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan, Sulawesi, NTB, NTT, dan Papua sepanjang 19.370 km						
1	Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan dan Jembatan Nasional	Terjaganya kualitas jalan dan jembatan sepanjang 171.695 Km	Jumlah jalan yang dipreservasi sepanjang 171.695 Km	31.227,80 Km	35.058,94 Km	35.046,13 Km	35.094,41 Km	35.268,66 Km	47.545,9	Kemen. PU
			Jumlah jembatan yang dipreservasi sepanjang 602.944,40 Meter	118.837,54 Meter	121.026,71 Meter	121.026,71 Meter	121.026,71 Meter	5.426,1		
		Meningkatnya kapasitas dan kualitas jalan sepanjang 19.407,27 Km jalan nasional dan 26.957,83 meter jembatan	Jumlah jalan yang ditingkatkan kapasitasnya (pelebaran) sepanjang 19.370 Km	3.660,30 Km	3.977,61 Km	4.004,89 Km	3.956,62 Km	3.771,39 Km	67.021,5	
			Jumlah jalan lingkar/bypass yang dibangun sepanjang 36,65 Km	0,24 Km	5,52 Km	8,74 Km	12,27 Km	9,87 Km	534,5	
			Jumlah jembatan yang bangun sepanjang 16.157,83 meter	3.170,42 Meter	3.258,26 Meter	3.287,60 Meter	3.258,20 Meter	3.183,35 Meter	4.000,9	
			Jumlah flyover/underpass yang dibangun sepanjang 10.800 meter	4.345,00 Meter	2.816,50 Meter	2.598,50 Meter	640,00 Meter	400,00 Meter	2.437,0	
			Jumlah jalan strategis di lintas Selatan Jawa, perbatasan, terpencil dan terluar yang dibangun sepanjang 1.377,94 Km	113,43 Km	181,54 Km	303,42 Km	392,70 Km	386,86 Km	7.403,9	

NO	SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PAGU (RP MILIAR)	K/L
				2010	2011	2012	2013	2014	TOTAL	
2	Pembinaan Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan dan Fasilitas Jalan Bebas Hambatan dan Perkotaan	Meningkatnya kapasitas jalan tol sepanjang 120,35 Km	Jumlah jalan tol yang dibangun sepanjang 120,35Km	5,05 Km	1,50 Km	37,20 Km	47,20 Km	29,40 Km	8.815,0	
3. PERHUBUNGAN: Pembangunan jaringan prasarana dan penyediaan sarana transportasi antar-moda dan antar-pulau yang terintegrasi sesuai dengan Sistem Transportasi Nasional dan Cetak Biru Transportasi Multimoda dan penurunan tingkat kecelakaan transportasi sehingga pada 2014 lebih kecil dari 50% keadaan saat ini										
1	Terbangunnya ter minal antarnegara dan antarprovinsi di 15 lokasi per tahun	15 lokasi per tahun	lokasi	15 Lokasi	22 Lokasi	22 Lokasi	29 Lokasi	29 Lokasi	609,6	Kemenhub
2	Terbangunnya 3 paket akses Pelabuhan Tanjung Priok, Belawan, Bandara Juanda Surabaya	3 paket	paket	3 paket	3 paket	3 paket	3 paket	3 paket	3.300,0	Kemenhub
3	Pembangunan Bus Air	Terbangunnya unit bus air	unit bus air	4	4	4	3	3	51,6	Kemenhub
4	Pembangunan dan pengelolaan prasarana KA	954,43 km jalur KA baru/ jalur ganda	Panjang km jalur KA baru yang dibangun termasuk jalur ganda	68,67 km	141,14 km	210,38 km	272,69 km	261,55 km	9.751,7	Kemenhub
		71 paket peningkatan pelistrikan (diantaranya elektrifikasi sepanjang 289 km)	Jumlah paket pekerjaan peningkatan pelistrikan	13 Paket	13 Paket	14 Paket	15 Paket	16 Paket	2.088,4	Kemenhub

NO	SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PAGU (RP MILIAR)	K/L
				2010	2011	2012	2013	2014	TOTAL	
5	Pembangunan sarana Ka	186 unit Sarana KA (Lokomotif, KRDI, KRDE, KRL, Tram, Railbus)	Jumlah unit pengadaan lokomotif, KRDI, KRDE, KRL, Tram, Railbus	7 paket	30 paket	34 paket	48 paket	67 paket	880,8	Kemenhub
6	Terbangunnya Bandara Kualanamu	1 paket	paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	2.000,0	Kemenhub
7	Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan Prasarana Bandar Udara	205 paket bandara yang dikembangkan dan direhabilitasi	Jumlah bandar udara yang dikembangkan, direhabilitasi	205	205	205	205	205	6.976,3	Kemenhub
		28 paket bandara yang dikembangkan di daerah perbatasan dan rawan bencana	Jumlah Bandar udara yang dikembangkan di daerah perbatasan dan rawan bencana	4	8	11	12	14	1.066,1	Kemenhub
8	Rehabilitasi fasilitas keselamatan transportasi darat	5 Paket	Jumlah Rehabilitasi Fasilitas Keselamatan LLAJ	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	21,4	
9	Pengadaan peralatan/fasilitas sarana dan keselamatan perkeretaapian	72 paket	Jumlah paket pengadaan peralatan/fasilitas sarana dan keselamatan perkeretaapian	11 paket	13 paket	16 paket	15 paket	17 paket	391,6	Kemenhub
10	Pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan di bidang Kenavigasian	Terbangunnya sarana bantu navigasi pelayaran terdiri 93 menara suar; 185 rambu suar; 153 pelampung suar;))	Unit (menara suar; rambu suar; pelampung suar)	18; 23 ; 30	18 ; 29 ; 30	18; 38 ; 35	19 ; 42 ; 40	20 ; 53 ; 18	1.127,6	Kemenhub
		Terpasangnya 39 VTS a.l Selat Malaka, Selat Sunda, Selat Lombok	Unit	15	7	8	4	5	1.024,9	Kemenhub

NO	SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PAGU (RP MILIAR)	K/L
				2010	2011	2012	2013	2014	TOTAL	
		Tersedianya 15 unit kapal kenavigasian	Unit Kapal Navigasi	1	2	3	4	5	120,0	Kemenhub
11	Pengelolaan dan Penyelenggaraan kegiatan di bidang Pelabuhan dan Pengerukan	Tersedianya alur pelayaran yang aman untuk kapal melalui pengerukan 61.7150.00 m3 sedimen	volume lumpur/sedimen yang dikeruk (juta m3)	6	15	11.32	16.08	13.03	880,0	Kemenhub
		Terbangunnya/Meningkatnya kapasitas 275 lokasi prasarana dan fasilitas pelabuhan utama, pengumpul, pengumpan (non strategis)	lokasi prasarana dan fasilitas pelabuhan	55	55	55	55	55	3.500,0	Kemenhub
12	Paket/Unit/set peralatan keamanan penerbangan	1.423 Paket/	Paket/Unit/set	473	109	114	113	140	865,3	Kemenhub
13	412 unit/paket/set peralatan navigasi	412 unit/paket/set	unit/paket/set	124	49	39	29	27	1.676,9	Kemenhub
14	pesawat udara kalibrasi termasuk console (FIS) kalibrasi	3 unit	unit pesawat udara kalibrasi	1	1	-	1	-	443,3	Kemenhub
15	Koordinasi Pengembangan Urusan Infrastruktur Transportasi	Meningkatnya koordinasi urusan infrastruktur transportasi	Persentase rekomendasi hasil koordinasi kebijakan urusan infrastruktur transportasi yang terimplementasi	60%	70%	75%	80%	85%	19,3	Kemenko Perekonomian

NO	SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PAGU (RP MILIAR)	K/L
				2010	2011	2012	2013	2014	TOTAL	
				4. PERUMAHAN RAKYAT: Pembangunan 685.000 Rumah Sederhana Sehat Bersubsidi, 180 Rusunami dan 650 twin block berikut fasilitas pendukung kawasan permukiman yang dapat menampung 836.000 keluarga yang kurang mampu pada 2012						
1	Pembangunan rumah susun sederhana sewa	380 twin block	Jumlah rusunawa terbangun	100	100	180	0	0	4.560,0	Kemenpera
2	Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan dan Penyelenggaraan dalam Pengembangan Permukiman	26.700 unit (270 twin block)	Jumlah satuan unit hunian rumah susun yang terbangun dan infrastruktur pendukungnya	3.960	7.041	7.041	5.200	3.458	3.330,00	Kemen. PU
3	Fasilitas pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas kawasan perumahan dan permukiman	700.000 unit	Jumlah fasilitas dan stimulasi prasarana, sarana, dan utilitas kawasan perumahan dan permukiman	90.374	117.010	145.000	161.616	186.000	4.375,00	Kemenpera
4	Bantuan subsidi perumahan Tahun 2010-2014	1.350.000 unit	Jumlah bantuan subsidi perumahan	21.000	25.000	290.000	290.000	310.000	20.700,00	Kemenpera
5	Pembayaran Tunggal Subsidi Tahun 2008-2009	187.006 unit	Jumlah bantuan subsidi perumahan	187.006	-	-	-	-	923,51	Kemenpera
6	Fasilitas dan stimulasi pembangunan baru perumahan swadaya	200.000 unit	Jumlah fasilitas dan stimulasi pembangunan baru perumahan swadaya	30.000	50.000	65.000	30.000	25.000	2.145,00	Kemenpera
7	Fasilitas dan stimulasi peningkatan kualitas perumahan swadaya	400.000 unit	Jumlah fasilitas dan stimulasi peningkatan kualitas perumahan	50.000	75.000	85.000	90.000	100.000	625,00	Kemenpera

NO	SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PAGU (RP MILIAR)	K/L
				2010	2011	2012	2013	2014	TOTAL	
			swadaya							
5.PENGENDALIAN BANJIR: Penyelesaian pembangunan prasarana pengendalian banjir, diantaranya Banjir Kanal Timur Jakarta sebelum 2012 dan penanganan secara terpadu Daerah Aliran Sungai Bengawan Solo sebelum 2013										
1	Pengendalian Banjir, Lahar Gunung Berapi dan Pengamanan Pantai	Terlindunginya kawasan seluas 48,66 ribu hektar dari bahaya banjir dan terlindunginya kawasan pantai sepanjang 80 km dari abrasi pantai serta terkendalinya 16 juta m3 lahar gunung berapi/sedimen	Panjang sarana/prasarana pengendali banjir yang dibangun (216 km)	168 km	12 km	12 km	11 km	13 km	2,508.6	Kemenneg PU
			Panjang sarana/prasarana pengendali banjir yang direhabilitasi (386 km)	139 km	153 km	90 km	2 km	1 km	3,745.0	Kemenneg PU
			Panjang sarana / prasarana pengendali banjir yang dioperasikan dan dipelihara (2.000 km) untuk mengamankan kawasan seluas 35,7 ribu hektar	700 km	1.000 km	1.500 km	1.750 km	2.000 km	927.5	Kemenneg PU
			Jumlah sarana/prasarana pengendali lahar/sedimen yang dibangun (28 buah) untuk mengendalikan lahar/sedimen dengan volume 16 juta m ³	28 buah					116.5	Kemenneg PU

NO	SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITYAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PAGU (RP MILIAR)	K/L
				2010	2011	2012	2013	2014	TOTAL	
			Jumlah sarana/prasarana pengendali lahar/sedimen yang direhabilitasi (85 unit) untuk mengendalikan lahar/sedimen dengan volume 6 juta m ³	4 buah	13 buah	20 buah	23 buah	25 buah	145.0	Kemenneg PU
			Jumlah sarana/prasarana pengendali lahar/sedimen yang dioperasikan dan dipelihara (150 unit) untuk mengendalikan lahar/sedimen dengan volume 12 juta m ³	10 buah	20 buah	30 buah	40 buah	50 buah	75.0	Kemenneg PU
			Panjang sarana/prasarana pengaman pantai yang dibangun (30 km)	30 km					200.0	Kemenneg PU
			Panjang sarana/prasarana pengaman pantai yang direhabilitasi (50 km)	3 km	10 km	10 km	10 km	17 km	278.5	Kemenneg PU
			Panjang sarana/prasarana pengaman pantai yang dipelihara (50 km)	30 km	5 km	5 km	5 km	5 km	50.0	Kemenneg PU

NO	SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITYAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PAGU (RP MILIAR)	K/L
				2010	2011	2012	2013	2014	TOTAL	
		Diselesaikannya dan berfungsinya Banjir Kanal Timur untuk mengurangi daerah genangan akibat banjir di Wilayah Jakarta	Diselesaikannya pembangunan kanal timur paket 22 s/d 29	paket 22 s/d 29					613.7	Kemenneg PU
	Diselesaikannya kegiatan supervisi konstruksi Banjir Kanal Timur		1 kegiatan					5.7		
	Terbangunnya bangunan akhir / jetty di muara Banjir Kanal Timur			800 meter				196.1		
	Terbangunnya jalan inspeksi			19 km				76.4		
	Terbangunnya perkuatan tebing			17 km				59.3		
	Diselesaikannya normalisasi Kali Blencong			1 km				79.5		
	Terbangunnya inlet Cakung			1 buah				14.2		
	Diselesaikannya dan berfungsinya Banjir Kanal Timur untuk mengurangi daerah genangan akibat banjir di Wilayah Jakarta	Terbangunnya Saluran Gendong		7 km				17.8	Kemenneg PU	
		Terbangunnya Utilitas (PGN Jaktim, PLN Jaktim, TPJ)		3 unit				20.2		
		Terbangunnya Jembatan penyeberangan orang (BKT 226)		1 buah				5.1		
		Terbangunnya Jembatan BKT 207		1 buah				5.1		
		Terbangunnya <i>drain inlet</i>		2 buah				2.2		
		Terbangunnya perkuatan bronjong		18.000 m3				41.8		

NO	SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITYAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PAGU (RP MILIAR)	K/L
				2010	2011	2012	2013	2014	TOTAL	
			Tebangunnya jalan oprit		2 buah				7.3	
			Diselesaikanya pekerjaan galian dan timbunan hulu Kali Sunter		100 meter				0.9	
			Diselesaikannya Pemasangan <i>Grass Block</i>		23,5 meter				28.2	
		Terkendalnya bahaya banjir di Daerah Aliran Sungai Bengawan Solo	terbangunnya prasarana pengendali banjir di DAS Bengawan Solo	pompa banjir di 5 lokasi					40.0	Kemeneg PU
		Terkendalnya bahaya banjir di Daerah Aliran Sungai Bengawan Solo	Terbangunnya prasarana pengendali banjir DAS Bengawan Solo	7 waduk	7 waduk	7 waduk	7 waduk	7 waduk	3.390,0	Kemeneg PU
			Terehabilitasinya prasarana pengendali banjir di DAS Bengawan Solo (8 Lokasi)	8 waduk	8 waduk	8 waduk	8 waduk	8 waduk	1.190,0	Kemeneg PU
			Terpeliharanya waduk di DAS Bengawan Solo	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	180,0	Kemeneg PU
			Terlaksananya konservasi di DAS Bengawan Solo (2 Lokasi)	-	2 lokasi	2 lokasi	2 lokasi	2 lokasi	190,0	Kemeneg PU

NO	SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PAGU (RP MILIAR)	K/L
				2010	2011	2012	2013	2014	TOTAL	
				6. TELEKOMUNIKASI: Penuntasan pembangunan jaringan serat optik di Indonesia bagian timur sebelum 2013 dan maksimalisasi tersedianya akses komunikasi data dan suara bagi seluruh rakyat						
1	Perencanaan dan Rekayasa Alokasi Spektrum Frekuensi	Kebijakan, regulasi, rencana pemanfaatan dan rekayasa sumber daya spektrum frekuensi radio	Prosentase jumlah penetapan pita frekuensi radio dan pemanfaatan slot orbit satelit	95%	95%	95%	95%	95%	120,68	Kemenkominfo
			Prosentase utilitas pemanfaatan spektrum frekuensi radio	40%	60%	80%	100%	100%		
2.	Pelaksanaan Layanan Pemanfaatan Sumber Daya Pos dan Informatika	Kebijakan, regulasi, rencana optimalisasi sumber daya spektrum dan non spektrum	Prosentase pengelolaan sumber daya spektrum frekuensi radio dan orbit satelit	40%	60%	80%	100%	100%	519,68	Kemenkominfo
			Prosentase pengelolaan sumber daya pos, penomoran telekomunikasi dan alamat IP	40%	60%	80%	100%	100%		
3.	Pengembangan Penyelenggaraan Telekomunikasi Sub Kegiatan Prioritas: Penyusunan <i>ICT Fund</i> untuk membiayai pembangunan jaringan <i>backbone</i> serat	Kebijakan, regulasi, perijinan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas layanan telekomunikasi	Prosentase penyelesaian penyusunan dan pembahasan <i>ICT Fund</i> dan optimalisasi PNB	100%	-	-	-	-	77,62	Kemenkominfo
			Prosentase pencapaian terhadap kuantitas dan kualitas layanan pos	60%	70%	80%	90%	100%		

NO	SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITYAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PAGU (RP MILIAR)	K/L
				2010	2011	2012	2013	2014		
	optik									
4.	Pengembangan Penyelenggaraan Penyiaran	Kebijakan, regulasi, perijinan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas layanan penyiaran	<p>Prosentase pencapaian terhadap ketepatan penyelesaian layanan perizinan</p> <p>Prosentase implementasi migrasi sistem penyiaran dari analog ke digital</p>	50%	65%	80%	95%	100%	498,92	Kemenkominfo
5.	Pelaksanaan Pengamanan Jaringan Internet	Keamanan terhadap jaringan internet nasional	Prosentase pencapaian keamanan trafik nasional, POP penyelenggara jasa internet dan internet <i>exchange</i> , titik akses ke lembaga pemerintahan dan <i>critical infrastructure</i>	50%	55%	60%	65%	70%	116,16	Kemenkominfo
6.	Fasilitasi Penerapan dan Pengembangan E-Government	Kebijakan, regulasi, bimbingan teknis, dan evaluasi pengembangan <i>e-government</i> nasional untuk mendorong peningkatan nilai <i>e-government</i> nasional menjadi 3,4 dan tingkat e-literasi menjadi 50%	Prosentase penyelesaian penyusunan / pembahasan RPP Penyelenggaraan Sistem Elektronik Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah (<i>e-Government</i>) dan <i>Master Plan e-Government</i> Nasional	100%	-	-	-	-	877,88	Kemenkominfo

NO	SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PAGU (RP MILIAR)	K/L
				2010	2011	2012	2013	2014	TOTAL	
							Prosentase peningkatan penerapan dan kualitas aplikasi <i>e-government</i> di pemerintah kab/kot	10%	40%	
7.	Fasilitasi Penerapan dan Pengembangan Sistem Keamanan Informasi Elektronik	Kebijakan, regulasi, bimbingan teknis dan evaluasi pengembangan sistem keamanan informasi elektronik	Prosentase penyelesaian pembahasan dan perbaikan materi RUU Rencana Tindak Pidana Teknologi Informasi (<i>Cyber Crime</i>)	50%	100%	-	-	-	120,36	Kemenkominfo
			Prosentase penyusunan peraturan pelaksana UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	100%	-	-	-	-		
			Prosentase penyelenggara sistem pengamanan elektronik dapat memenuhi kebutuhan masyarakat	10%	40%	60%	80%	100%		
8.	Pengembangan Standarisasi Perangkat Pos dan Informatika	Kebijakan, regulasi, standar, sertifikasi, interoperabilitas perangkat pos, telekomunikasi dan penyiaran	Prosentase pencapaian standar kelayakan teknis perangkat pos, telekomunikasi dan penyiaran	40%	60%	80%	100%	100%	65,42	Kemenkominfo

NO	SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PAGU (RP MILIAR)	K/L
				2010	2011	2012	2013	2014		
							Prosentase peningkatan interoperabilitas pada layanan perangkat, aplikasi dan layanan	40%	60%	
9.	Pengembangan Standarisasi Layanan Pos dan Informatika	Kebijakan, regulasi, standar, sertifikasi, interoperabilitas layanan pos, telekomunikasi dan penyiaran	Paket penyusunan kebijakan, regulasi, sertifikasi di bidang layanan pos, telekomunikasi, dan penyiaran	10 paket	10 paket	10 paket	10 paket	10 paket	65,41	Kemenkominfo
10.	Pelaksanaan Pemberdayaan dan Pemerataan Pembangunan Sarana dan Prasarana Informatika	Layanan akses informasi dan komunikasi di wilayah non komersial	Prosentase ibukota provinsi yang terhubung dengan jaringan serat optik	10%	30%	50%	70%	100%	7.367,12	Kemenkominfo
			Prosentase ibukota kab/kota yang terhubung jaringan <i>broadband</i>	25%	30%	50%	60%	75%		
			Prosentase ibukota provinsi yang memiliki regional <i>internet exchange</i>	10%	30%	50%	80%	100%		
			Prosentase ibukota provinsi yang memiliki <i>international internet exchange</i>	10%	30%	50%	80%	100%		
			Jumlah Desa Informasi yang dilengkapi radio komunitas	15 desa	76 desa	200 desa	350 desa	500 desa		

NO	SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PAGU (RP MILIAR)	K/L
				2010	2011	2012	2013	2014	TOTAL	
							Prosentase desa yang dilayani akses telekomunikasi	100%	100%	
			Prosentase desa yang dilayani akses internet	5%	20%	40%	60%	80%		
7.TRANSPORTASI PERKOTAAAN:										
Perbaikan sistem dan jaringan transportasi di 4 kota besar (Jakarta, Bandung, Surabaya, Medan) sesuai dengan Cetak Biru Transportasi Perkotaan, termasuk penyelesaian pembangunan angkutan kereta listrik di Jakarta (MRT dan Monorail) selambat-lambatnya 2014.										
A	Pembinaan dan Pengembangan Sistem Transportasi Perkotaan	Tersusunnya 100% rencana dan program sistem transportasi dan evaluasi pelaksanaan program	Jumlah rencana Induk Angkutan Perkotaan, Rencana Induk Sistem Informasi Lalu Lintas Perkotaan, Laporan evaluasi, Terselenggaranya ATCS, Jumlah Fasilitas Keselamatan Transportasi Perkotaan.	1 Paket	2 Paket	3 Paket	4 Paket	4 Paket	282,5	Kemenhub
		Terselenggaranya Transportasi Perkotaan	Jumlah Pengembangan Bus Rapid Transit (BRT), Kota Percontohan, Kawasan Percontohan.	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	379,2	Kemenhub
		Transportasi Ramah lingkungan	Jumlah Penyelenggaraan Transportasi Ramah Lingkungan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	137,6	Kemenhub

NO	SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITYAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PAGU (RP MILIAR)	K/L
				2010	2011	2012	2013	2014	TOTAL	
B	Penyelesaian pembangunan angkutan kereta listrik di Jakarta (MRT dan monorail)	*) Sasaran tidak tercapai dikarenakan besar pagu Ditjen KA Kemenhub hanya 30,79 T maka besar pagu untuk MRT dan Monorail baru ditampung sebagian	Paket Monorail dan Paket MRT	2 paket	2 paket	2 paket	2 paket	2 paket	2.000,0	Kemenhub

PRIORITAS 7	IKLIM INVESTASI DAN IKLIM USAHA
TEMA PRIORITAS	<i>Peningkatan investasi melalui perbaikan kepastian hukum, penyederhanaan prosedur, perbaikan sistem informasi, dan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)</i>
PENANGGUNGJAWAB	Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
BEKERJASAMA DENGAN	Menteri Keuangan; Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia; Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional; Menteri Perdagangan; Menteri Perindustrian; Menteri Perhubungan; Menteri Pekerjaan Umum; Menteri Komunikasi dan Informatika; Menteri Dalam Negeri; Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal; Kepala Badan Pertanahan Nasional

No	SUBSTANSI INTI / KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PAGU (Rp.MILIAR)	K/L
				2010	2011	2012	2013	2014		
									Total	
1. KEPASTIAN HUKUM: Reformasi regulasi secara bertahap di tingkat nasional dan daerah sehingga terjadi harmonisasi peraturan perundang-undangan yang tidak menimbulkan ketidakjelasan dan inkonsistensi dalam implementasinya										
1.	Kegiatan Perancangan Peraturan Perundang-undangan	Peningkatan kualitas RUU dan peraturan perundang-undangan di bawah UU (RanperUU) di DPR serta tenaga fungsional Perancang PerUUan	<ul style="list-style-type: none"> Persentase yg mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan perkembangan, Persentase yg selesai dibahas di DPR secara tepat waktu, Persentase tenaga fungsional perancang peraturan perUU yang mendapat kualifikasi dan promosi sesuai standar secara tepat waktu dan akuntabel Persentase kelengkapan dokumentasi dan pustaka secara akurat dan up to date Pembenahan Peraturan perUUan di bidang Pertanahan, tata ruang, dan LH Peraturan perUUan di bidang mekanisme 	20%	40%	60%	80%	100%	75,5	Kemenkumham

No	SUBSTANSI INTI / KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PAGU (Rp.MILIAR)	K/L
				2010	2011	2012	2013	2014	Total	
			Perlindungan Saksi dan Pelapor • Peraturan perUUan di bidang yang mendorong pemberantasan korupsi							
2.	Kegiatan Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan	Meningkatkan keharmonisan rancangan peraturan perundang-undangan tingkat pusat bidang politik, hukum, keamanan, keuangan, perbankan, industri, perdagangan, sumber daya alam, riset, teknologi, kesejahteraan rakyat yang harmonis	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase di bidang politik, hukum dan keamanan • Persentase di bidang keuangan dan perbankan • Persentase di bidang industri dan yang harmonis • Persentase di bidang Kesra • Pembenahan Peraturan perUUan di bidang Pertanahan, tata ruang, dan LH • Peraturan Perundang-undangan di bidang mekanisme Perlindungan Saksi dan Pelapor • Peraturan perUUan yg mendorong pemberantasan korupsi 	20%	40%	60%	80%	100%	38,5	Kemenkumham
3	Penataan Produk Hukum dan Pelayanan Bantuan Hukum Departemen	Harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perUUan di tingkat pusat dan daerah	Jumlah Perda yang dikaji	Kajian 3.000 perda	Kajian 9.000 perda	Kajian 3.000 perda	Kajian 2.500 perda	Kajian 2.500 perda	12,5	Kemendagri

No	SUBSTANSI INTI / KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PAGU (Rp.MILIAR)	K/L
				2010	2011	2012	2013	2014	Total	
4	Peningkatan Deregulasi Kebijakan Penanaman Modal	Merealisasikan kegiatan kajian analisis kebijakan dan kegiatan sosialisasi kebijakan yang berorientasi pada peningkatan daya saing	Jumlah rumusan untuk bahan pertimbangan penyusunan kebijakan penanaman modal	1 rekomendasi	1 rekomendasi	1 rekomendasi	1 rekomendasi	1 rekomendasi	92,33	BKPM
			Rumusan kebijakan sebagai masukan bagi penyempurnaan kebijakan dan pengembangan penanaman modal yg berdaya saing	1 rumusan	1 rumusan	1 rumusan	1 rumusan	1 rumusan		
			Kegiatan Sosialisasi dalam negeri	15	12	13	14	15		
			Kegiatan Sosialisasi luar negeri	5	4	4	5	5		
			Kegiatan Fasilitasi dalam negeri	20	17	17	18	20		
			Kegiatan Fasilitasi luar negeri	15	12	12	14	15		
5	Pengelolaan Pertanahan Propinsi	Terwujudnya pengembangan infrastruktur pertanahan secara nasional, regional, dan sektoral, yang kondusif bagi iklim usaha di seluruh Indonesia	Cakupan Peta Pertanahan	2.100.000 ha	2.100.000 ha	2.100.000 ha	2.100.000 ha	2.100.000 ha	228,33	BPN
		Terwujudnya percepatan legalisasi aset pertanahan, ketertiban administrasi pertanahan dan kelengkapan informasi legalitas aset tanah	Terlaksananya legalisasi aset tanah	326.237 bidang	846.193 bidang	918.339 bidang	956.998 bidang	1.015.663 bidang	2.229,94	
		Berkurangnya sengketa, konflik & perkara pertanahan serta mencegah timbulnya sengketa, konflik dan perkara pertanahan	Penanganan sengketa, konflik dan perkara pertanahan serta mencegah timbulnya kasus pertanahan baru	2.791 kasus	2.791 kasus	2.791 kasus	2.791 kasus	2.791 kasus	107,97	
6	Pengelolaan Data dan Informasi Pertanahan	Tersedianya data dan informasi per-tanahan yang terintegrasi	Peningkatan akses layanan pertanahan melalui LARASITA	156 kab/kota	419 kab/kota	419 kab/kota	419 kab/kota	419 kab/kota	254,29	BPN

No	SUBSTANSI INTI / KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PAGU (Rp.MILIAR) Total	K/L
				2010	2011	2012	2013	2014		
		secara nasional (Sistem Informasi Manajemen Pertanahan nasional/Simtanas)								
7	Pengembangan Penyelenggaraan Pos	Kebijakan, regulasi, perijinan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas layanan pos	Persentase penyelesaian penyusunan peraturan pelaksana UU No. 38 Tahun 2009 tentang Pos	60%	100%	-	-	-	57,35	Kemenkominfo
8	Pengembangan Penyelenggaraan Telekomunikasi	Kebijakan, regulasi, perijinan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas layanan telekomunikasi	Persentase pembahasan dan perbaikan materi RUU Multimedia (Konvergensi Telematika) sebagai pembaharuan UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi dan UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran	20%	40%	60%	80%	100%	85,57	Kemenkominfo
9	Pengembangan Penyelenggaraan Penyiaran	Kebijakan, regulasi, perijinan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas layanan penyiaran	Persentase pencapaian terhadap pembaharuan kebijakan, regulasi dan kelembagaan akibat adanya digitalisasi dan perkembangan industri	60%	70%	80%	90%	100%	498,92	Kemenkominfo
2. PENYEDERHANAAN PROSEDUR:										
Penerapan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di beberapa kota yang dimulai di Batam, pembatalan perda bermasalah dan pengurangan biaya untuk memulai usaha seperti Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP)										
1	Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Penanaman Modal	Meningkatnya kualitas pelayanan penanaman modal di pusat dan di daerah	Jumlah peserta Diklat Penyelenggaraan PTSP: pelatihan dasar, lanjutan I, lanjutan II, dan SPIPISE Penetapan Kualifikasi Kelembagaan PTSP Pengadaan sarana dan prasarana penunjang Penyelenggaraan PTSP	2.000 orang 265 PTSP 33 Prov + 30 kab/kota	2.000 orang 265 PTSP 20 kab/kota	2.000 orang 265 PTSP 20 kab/kota	2.000 orang 265 PTSP 20 kab/kota	2.000 orang 265 PTSP -	265,65	BKPM

No	SUBSTANSI INTI / KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PAGU (Rp.MILIAR)	K/L
				2010	2011	2012	2013	2014	Total	
			Sosialisasi perizinan dan nonperizinan	33 Provinsi	33 Provinsi	33 Provinsi	33 Provinsi	33 Provinsi		
			Fasilitasi Penghubung di BKPM	19 instansi + 33 provinsi masing-masing 1 orang	19 instansi + 33 provinsi masing-masing 1 orang	19 instansi + 33 provinsi masing-masing 1 orang	19 instansi + 33 provinsi masing-masing 1 orang	19 instansi + 33 provinsi masing-masing 1 orang		
			Penyederhanaan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal	3 Instansi	3 Instansi	3 Instansi	3 Instansi	3 Instansi		
2	Pengembangan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE)	Meningkatnya kualitas pengembangan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik/ Online (SPIPISE)	Peningkatan jumlah aplikasi perizinan dan non perizinan yang menjadi wewenang BKPM, PTSP Provinsi, PTSP Kab./Kota melalui SPIPISE	Perijinan di 3 sektor	Perijinan di 3 sektor	Perijinan di 2 sektor	Perijinan di 1 sektor	Implementasi nasional untuk semua sektor	100,29	BKPM
			Jumlah peningkatan PTSP Prov. dan Kab/Kota yang terhubung dalam SPIPISE	50 Kab/Kota dan 33 Prov	50 Kab/Kota dan 33 Prov	50 Kab/Kota dan 33 Prov	50 Kab/Kota dan 33 Prov	50 Kab/Kota dan 33 Prov		
			Terbangunnya infrastruktur dan database penanaman modal yang terintegrasi	Penambahan kapasitas dan kemampuan infrastruktur pada	Penambahan kapasitas dan kemampuan infrastruktur pada	Penambahan kapasitas dan kemampuan infrastruktur pada	Terbangunnya <i>Data Recovery Centre</i> (DRC)	Penambahan kapasitas dan kemampuan infrastruktur pada jaringan.		

No	SUBSTANSI INTI / KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PAGU (Rp.MILIAR) Total	K/L
				2010	2011	2012	2013	2014		
				jaringan.	jaringan.	jaringan.				
			Jumlah provinsi dan Kab/Kota yang mengikuti sosialisasi dan pelatihan	50 Kab/Kota dan 33 Prov	50 Kab/Kota dan 33 Prov	50 Kab/Kota dan 33 Prov	50 Kab/Kota dan 33 Prov	50 Kab/Kota dan 33 Prov		
3	Koordinasi Peningkatan Ekspor dan Peningkatan Investasi (PEPI)	Meningkatnya koordinasi di bidang peningkatan ekspor dan peningkatan investasi	Persentase rekomendasi hasil koordinasi kebijakan di bidang peningkatan ekspor dan investasi yang terimplementasikan	65%	70%	75%	80%	85%	15,8	Kemenko Perekonomian
4.	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah	Mempercepat proses perizinan di daerah	Jumlah daerah yang membentuk PTSP	5%	40%	50%	60%	70%	113,8	Kemendagri
			PTSP yang siap menerapkan SPIPISE	5%	30%	40%	50%	60%		
			Pembatalan Perda bermasalah	100%	100%	100%	100%	100%		
			Daerah yang mengurangi biaya untuk berusaha	30%	40%	50%	60%	70%		
3. LOGISTIK NASIONAL:										
Pengembangan dan penetapan Sistem Logistik Nasional yang menjamin kelancaran arus barang dan mengurangi biaya transaksi/ekonomi biaya tinggi										
1	Peningkatan Kelancaran Distribusi Bahan Pokok	Terlaksananya kebijakan dan bimbingan teknis dalam rangka peningkatan kelancaran distribusi dan stabilisasi harga bahan pokok	Jumlah rumusan kebijakan dan standar, norma, kriteria dan prosedur di bidang pembinaan pasar dan distribusi (jenis)	6	6	5	4	4	226,75	Kemendagri
			Jumlah pelaku usaha yang mengikuti pembinaan, pelatihan dan bimbingan teknis	1.920	2.250	2.500	2.750	3.000		
			Persentase rata-rata perbedaan tingkat harga Bahan Pokok antar provinsi	15%	12%	11%	10%	9%		
			Persentase ketersediaan barang kebutuhan pokok bagi masyarakat	90%	92%	94%	96%	98%		

No	SUBSTANSI INTI / KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PAGU (Rp.MILIAR) Total	K/L
				2010	2011	2012	2013	2014		
			Jumlah perijinan di bidang pembinaan pasar dan distribusi yang dijalani secara online	6	9	9	11	11		
			Waktu penyelesaian perijinan dan nonperijinan dibidang pembinaan pasar dan distribusi (hari)	6	6	5	4	2		
2	Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan	Terbangunnya sarana distribusi dalam rangka kelancaran distribusi barang pokok	Jumlah pasar percontohan (unit)	2	15	20	23	26	875,5	Kemendag
			Jumlah pembangunan pusat distribusi	-	1	1	1	1		
			Jumlah rekomendasi penataan sistem distribusi)	2	3	4	5	6		
3	Koordinasi Penataan dan Pengembangan Sistem Logistik Nasional	Terkoordinasinya pelaksanaan Kebijakan Penataan dan Pengembangan Sistem Logistik Nasional	Persentase rekomendasi hasil koordinasi kebijakan penataan dan pengembangan sistem logistik nasional yang ditindaklanjuti	60%	70%	75%	80%	85%	7,6	Kemenko Perekonomian
4	Perumusan Kebijakan dan Bimbingan Teknis Fasilitas Kepabeanan	Terciptanya administrator di bidang fasilitas kepabeanan yang dapat memberikan dukungan industry, perdagangan dan masyarakat serta optimalisasi pendapatan Terwujudnya pelayanan yang efisien dan pengawasan efektif	1. Persentase realisasi janji layanan publik terkait pemberian fasilitas pembebasan dan keriganan bea masuk	70%	72%	75%	77%	80%	133,04	Kemenkeu
			2. Persentase realisasi janji layanan publik terkait pemberian fasilitas pertambangan	70%	72%	75%	77%	80%		
			3. Persentase realisasi janji layanan publik terkait pemberian tempat penimbunan berikat (TPB).	70%	72%	75%	77%	80%		
			4. Persentase penyelesaian rancangan PMK dan aturan pelaksanaan lainnya terkait sistem pelayanan kepabeanan yang menunjang Sistem Logistik Nasional (<i>Customs Advance Trade Systems</i>)	-	40%	60%	80%	100%		
			5. Persentase penyelesaian peraturan terkait sistem pelayanan kepabeanan dan cukai di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)	-	100%	-	-	-		

No	SUBSTANSI INTI / KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PAGU (Rp.MILIAR)	K/L
				2010	2011	2012	2013	2014	Total	
			6. PMK untuk pengembangan sistem elektronik terkait dengan perijinan investasi di bidang kepabeanan dan perpajakan	-	40%	60%	80%	100%		
			7. PMK tentang <i>Authorized Economic Operator</i> (AEO) dan dukungan terkait dengan Sistem Logistik Nasional	-	40%	60%	80%	100%		
			8. PMK-PMK tentang pemberian fasilitas fiskal sesuai peraturan perundang-undangan dan skema pembiayaan infrastruktur ke dan di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)	-	40%	60%	80%	100%		
			9 .PMK untuk memadukan Kawasan Pelayanan Pabean Terpadu (KPPT) dengan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di 5 lokasi (di Jawa dan Sumatra)	-	100%	-	-	-		
5	Pengelolaan dan Penyelenggaraan kegiatan di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Laut	Terselenggaranya <i>National Single Window</i> pada 14 lokasi	lokasi pelabuhan	1 (Kantor Pusat)	2 (Adpel Palembang dan Adpel Panjang)	4 (Adpel Bitung, Ambon, Makassar dan Banjarmasin)	4 (Adpel Pekan Baru, Pontianak, Samarinda dan Sorong)	3 (Jayapura, Benoa dan Ternate)	151,0	Kemenhub
6	Pelaksanaan azas cabotage melalui Pengembangan dan Pemberdayaan armada kapal niaga Nasional	Meningkatnya armada niaga pelayaran nasional melalui program <i>Two Step Loan Project for Development of Domestic Shipping Industry Phase I</i> (1paket)	jumlah kapal niaga	0	0	2	2	3	1.200,0	Kemenhub
7	Pengelolaan <i>Cargo Information System</i>	Terselenggaranya <i>Cargo Information System</i>	Paket System informasi cargo	1	2	4	4	3	54,00	Kemenhub
8	Penataan Sistem	Terwujudnya Tatanan	Jumlah Peraturan Perundangan, peraturan	2	3	3	3	4	148,00	Kemenhub

No	SUBSTANSI INTI / KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PAGU (Rp.MILIAR)	K/L
				2010	2011	2012	2013	2014	Total	
	Pelabuhan Nasional	Pelabuhan, Rencana Induk Pelabuhan Nasional, Rencana Induk Pelabuhan, serta Peraturan Perundangan Pelaksanaan	pelaksanaan teknis, dan laporan kajian							
9	Pengelolaan sarana dan fasilitas pelabuhan strategis dan pelabuhan untuk komoditas a.l Batubara, CPO	Optimalnya fungsi Sarana dan fasilitas 25 pelabuhan strategis Lhoksemawe, Belawan, Teluk Bayur, Dumai, Pekan Baru, Palembang, Panjang, Batan, Tg.Pinang, Tg.Priok, Tg.Emas, Tg.Perak, Cigading, Bena, Kupang, Pontianak, Banjarmasin, Samarinda, Balikpapan, Bitung, Makasar, Sorong, Ambon, Biak dan Jayapura.	Jumlah lokasi yang dibangun dan di rehab	5 Lokasi	5 Lokasi	5 Lokasi	5 Lokasi	5 Lokasi	8.292,0	Kemenuh
4. SISTEM INFORMASI: Beroperasinya secara penuh <i>National Single Window</i> (NSW) untuk impor (sebelum Januari 2010) dan ekspor. Percepatan realisasi proses penyelesaian bea cukai di luar pelabuhan dengan implementasi tahap pertama <i>Custom Advanced Trade System</i> (CATS) di dry port Cikarang										
1	Pengelolaan Fasilitas Ekspor dan Impor	Tersedianya kebijakan, Koordinasi, Bimbingan Teknis, Monitoring dan Evaluasi di bidang fasilitasi ekspor dan impor	Jumlah penerbitan kebijakan fasilitasi ekspor dan impor: (peraturan)	4	4	4	4	4	100,76	Kemendag
			Jumlah pengembangan sistem elektronik bidang fasilitasi pelayanan publik : (Kegiatan)	2	2	2	2	2		
			Jumlah pengguna perijinan ekspor/ impor <i>online</i> melalui INATRADE (perusahaan)	1.500	3.000	4.500	6.000	7.500		
			Jumlah bimbingan teknis bidang fasilitasi perdagangan: (kegiatan)	5	5	5	5	5		

No	SUBSTANSI INTI / KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PAGU (Rp.MILIAR)	K/L
				2010	2011	2012	2013	2014	Total	
			Jumlah koordinasi bidang fasilitasi perdagangan; (kegiatan)	60	60	60	60	60		
			Jumlah partisipasi sidang-sidang fasilitasi perdagangan didalam dan luar negeri; (kegiatan)	17	17	17	17	17		
			Jumlah laporan evaluasi pelaksanaan monitoring fasilitasi perdagangan	5	5	5	5	5		
2	Perumusan Kebijakan dan Pengembangan Teknologi Informasi Kepabeanaan dan Cukai	<p>1. Terciptanya administrator kepabeanaan dan cukai yang dapat memberikan fasilitasi terbaik berbasis teknologi informasi kepada industri, perdagangan, dan masyarakat serta optimalisasi penerimaan</p> <p>2. Terwujudnya tingkat pelayanan yang efisien kepada pemangku kepentingan berkaitan dengan layanan berbasis teknologi informasi</p>	<p>1. Persentase sistem aplikasi dan infrastruktur TI yang sesuai dengan proses bisnis DJBC</p> <p>2. Persentase penyelesaian aplikasi sistem kepabeanaan yang terintegrasi dengan portal NSW</p> <p>3. PMK untuk pengembangan sistem elektronik terkait dengan perijinan investasi di bidang kepabeanaan dan perpajakan</p> <p>4. PMK tentang <i>Authorized Economic Operator</i> (AEO) dan dukungan terkait dengan Sistem Logistik Nasional</p> <p>5. PMK tentang Kawasan Pelayanan Pabean Terpadu (KPPT) dalam rangka pengembangan sistem logistik</p> <p>6. PMK-PMK tentang pemberian fasilitas fiskal sesuai peraturan perundang-undangan dan skema pembiayaan infrastruktur ke dan di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)</p> <p>7. Percepatan operasionalisasi NSW. Untuk 5 pelabuhan, NSW untuk impor siap dilaksanakan akhir Desember 2009. Untuk pelabuhan yang lain, tergantung kebijakan dan kesiapan K/L lainnya</p>	100%	100%	100%	100%	100%	675.44	Kemenkeu
				-	40%	60%	80%	100%		
				-	40%	60%	80%	100%		
				-	40%	60%	80%	100%		
				-	40%	60%	80%	100%		
				100%	-	-	-	-		

No	SUBSTANSI INTI / KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PAGU (Rp.MILIAR)	K/L
				2010	2011	2012	2013	2014	Total	
3	Pelaksanaan National Single Window di sektor perhubungan	Terselenggaranya <i>National Single Window</i> pada 14 lokasi	Paket jaringan sistem <i>National Single Window</i>	1 lokasi (Kantor Pusat)	2 lokasi (Adpel Palembang dan Adpel Panjang)	4 lokasi (Adpel Bitung, Ambon, Makassar, dan Banjarmasin)	4 lokasi (Adpel Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, dan Sorong)	3 lokasi (Adpel Jayapura, Benoa, dan Ternate)	151,0	Kemhub
4	Koordinasi pengembangan dan penerapan sistem National Single Window/NSW dan ASEAN Single Window/ASW	Meningkatnya koordinasi di bidang pengembangan dan penerapan NSW dan ASW	Persentase rekomendasi di bidang pengembangan dan penerapan NSW dan ASW yang terimplementasikan	80%	80%	85%	90%	95%	16,20	Kemenko Perekonomian
5. KAWASAN EKONOMI KHUSUS (KEK):										
Pengembangan KEK di 5 lokasi melalui skema Public-Private Partnership sebelum 2012										
1	Dukungan Sektor Perdagangan Terhadap Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)	Meningkatnya peranan sektor perdagangan di kawasan ekonomi khusus	Jumlah PP tentang Kawasan Ekonomi Khusus (peraturan)	1	-	-	-	2	10,90	Kemendag
			Jumlah kebijakan perdagangan yang dilimpahkan ke KEK (peraturan)	1	1	1	1	1		
2	Pengembangan Penanaman Modal Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)	Terbentuknya KEK di 5 lokasi	Persentase penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan KEK	100%	100%	100%	100%	100%	18,02	BKPM
			Persentase penetapan institusi Sekretariat Dewan Nasional KEK	100%	100%	100%	100%	100%		

No	SUBSTANSI INTI / KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PAGU (Rp.MILIAR) Total	K/L
				2010	2011	2012	2013	2014		
			Persentase pengoperasian Sekretariat Dewan Nasional KEK	-	100%	100%	100%	100%		
			Asistensi dan fasilitasi dalam rangka pene tapan dan pengem-bangan KEK	100%	100%	100%	100%	100%		
			Hasil Koordinasi masalah strategis di bidang pengembangan KEK	1 buku laporan	1 buku laporan	1 buku laporan	1 buku laporan	1 buku laporan		
			Jumlah promosi penanaman modal di KEK	2 Negara & 3 daerah	3 Negara & 3 daerah	4 Negara & 3 daerah	5 Negara & 4 daerah	7 Negara & 8 daerah		
			Kerja sama di bidang pengembangan KEK	-	2 Negara	2 Negara	5 Negara	5 Negara		
3	Fasilitasi Pengembangan KEK	Meningkatnya fasilitasi pengembangan zona industri di 5 KEK	Dokumentasi fasilitasi (AMDAL, Engineering Design/DED, dan kelembagaan) di 5 kawasan	5	5	5	5	5	32,40	Kemenperin
4	Perumusan kebijakan di bidang PPN, PBB, BPHTB, KUP, PPSP, dan Bea Materai	Peningkatan efektifitas pembuatan peraturan	1. Persentase penyelesaian usulan pembuatan / Revisi peraturan perundangan terhadap peraturan perundangan yang harus dibuat / direvisi 2. Tersedianya PMK-PMK ttg Pemberian Fasililitas Fiskal sesuai Peraturan Per-UU-an dan skema Pembiayaan Infrastruktur ke & di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)	100% -	100% 40%	100% 60%	100% 80%	100% 100%	12.47	Kemenkeu
5	Perumusan kebijakan di bidang PPh dan perjanjian kerjasama perpajakan	Peningkatan efektifitas pembuatan peraturan	1. Persentase penyelesaian usulan pembuatan / Revisi peraturan perundangan terhadap peraturan perundangan yang harus dibuat / direvisi 2. Tersedianya PMK-PMK ttg Pemberian Fasililitas	100% -	100% 40%	100% 60%	100% 80%	100% 100%	13.64	Kemenkeu

No	SUBSTANSI INTI / KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PAGU (Rp.MILIAR)	K/L
				2010	2011	2012	2013	2014	Total	
	internasional		Fiskal sesuai Peraturan Per-UU-an dan skema Pembiayaan Infrastruktur ke & di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) 3. Peraturan pelaksanaan mengenai insentif potongan PPh 5% bagi perusahaan yang melakukan R&D	100%	-	-	-	-		
6	Perumusan Kebijakan dan Bimbingan Teknis Fasilitas Kepabeanaan	1. Terciptanya administrator di bidang fasilitas kepabeanaan yang dapat memberikan dukungan industry, perdagangan dan masyarakat serta optimalisasi pendapatan 2. Terwujudnya pelayanan yang efisien dan pengawasan efektif	1. Persentase realisasi janji layanan publik terkait pemberian fasilitas pembebasan dan keriganan bea masuk 2. Persentase realisasi janji layanan public terkait pemberian fasilitas pertambangan 3. Persentase realisasi janji layanan public terkait pemberian tempat penimbunan berikat (TPB). 4. Persentase penyelesaian rancangan PMK dan aturan pelaksanaan lainnya terkait sistem pelayanan kepabeanaan yang menunjang Sistem Logistik Nasional (<i>Customs Advance Trade Systems</i>) 5. Persentase penyelesaian peraturan terkait sistem pelayanan kepabeanaan dan cukai di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) 6. PMK untuk pengembangan sistem elektronik terkait dengan perijinan investasi di bidang kepabeanaan dan perpajakan 7. PMK tentang <i>Authorized Economic Operator</i> (AEO)	70%	72%	75%	77%	80%	*) Pagu sudah termasuk pada kegiatan di substansi inti ke tiga	Kemenkeu
				70%	72%	75%	77%	80%		
				70%	72%	75%	77%	80%		
				-	40%	60%	80%	100%		
				-	100%	-	-	-		
				-	40%	60%	80%	-		
				-	40%	60%	80%	-		

No	SUBSTANSI INTI / KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PAGU (Rp.MILIAR) Total	K/L
				2010	2011	2012	2013	2014		
			dan dukungan terkait dengan Sistem Logistik Nasional 8.PMK-PMK tentang pemberian fasilitas fiskal sesuai peraturan perundang-undangan dan skema pembiayaan infrastruktur ke dan di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) 9.PMK untuk memadukan Kawasan Pelayanan Pabean Terpadu (KPPT) dengan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di 5 lokasi (di Jawa dan Sumatra)	-	40%	60%	80%	-		
				-	100%	-	-	-		
7	Koordinasi Pengembangan Urusan Penataan Ruang dan Pengembangan Wilayah	Meningkatnya koor dinasi Urusan Penataan Ruang dan Pengembangan Wilayah	Persentase rekomen dasi kebijakan Urusan Penataan Ruang dan Pengembangan Wilayah yang terimplementasi	75%	80%	80%	85%	90%	22,65	Kemenko Perekonomian
		Terselesainya peraturan penyelenggaraan KEK dan penetapan lokasi KEK dan pengembangan KAPET	Persentase peraturan pelaksanan UU KEK yang terselesaikan	60%	70%	80%	90%	95%		
			Jumlah lokasi KEK yang ditetapkan	1	2	2	1	1		
6. KEBIJAKAN KETENAGAKERJAAN: Sinkronisasi kebijakan ketenagakerjaan dan iklim usaha dalam rangka penciptaan lapangan kerja										
1.	Penyempurnaan Peraturan Ketenagakerjaan	Peraturan yang dapat mendorong penciptaan kesempatan kerja dan memperkuat lembaga HI	Tersusunnya peraturan kompensasi & penetapan PHK, hubungan kerja (PKWT & <i>outsour cing</i>), pengupahan, perlindungan pekerja, mogok kerja	Naskah Akademis	1 UU aman demen	Peraturan pelaksanaan, sosialisasi konsolidasi	Peraturan pelaksanaan, sosialisasi, konsolidasi	Peraturan pelaksanaan,so sialisasi, konsolidasi	182,0	Kemenakertrans

No	SUBSTANSI INTI / KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PAGU (Rp.MILIAR) Total	K/L
				2010	2011	2012	2013	2014		
			Peraturan tentang organisasi pekerja/ buruh		Kajian & Naskah Akademis	1 UU amandemen	Peraturan pelaksanaan, Sosialisasi, Konsolidasi	Sosialisasi, Konsolidasi		
			Peraturan tentang penyelesaian perselisihan HI		Kajian & Naskah Akademis	1 UU amandemen	Peraturan pelaksanaan, Sosialisasi, Konsolidasi	Sosialisasi, Konsolidasi		
2	Sinkronisasi Kebijakan Ketengakerjaan (Pusat) dengan Kebijakan / Peraturan Daerah	Tersusunnya peraturan ketenagakerjaan pusat dan daerah yang sinergis	Harmonisasi kebijakan jaminan sosial		4 rancangan naskah				145,0	Kemenakertrans
			Selarasnya peraturan bidang HI	Inventarisasi perda HI	Review & assessment	Sosialisasi dan konsolidasi dengan pemda	Sosialisasi dan konsolidasi dengan pemda	Sosialisasi dan konsolidasi dengan pemda		
3.	Pengelolaan Kelembagaan dan Pemasyarakatan Hubungan Industrial	Tercapainya kesepakatan dalam hubungan kerja	Mekanisme perundingan secara bipartit, pencatatan, keterwakilan dan verifikasi SP/SB	2 naskah	2 naskah				368,5	Kemenakertrans
			Jumlah lembaga kerjasama (LKS) bipartit di perusahaan	naik 5%	naik 5%	naik 5%	naik 5%	naik 5%		
			Jumlah perwakilan pekerja, SP/SB & pengusaha yang mendapat pendidikan teknik bernegosiasi	500	750	1.000	1.250	1.500		
		Diterapkannya manajemen dan standar K3.	Jumlah perusahaan yang menerapkan manajemen K3	% perusahaan naik 10%	% perusahaan naik 10%	% perusahaan naik 10%	% perusahaan naik 10%	% perusahaan naik 10%	460,0	Kemenakertrans
		% kenaikan tenaga pengawas K3 bersertifikat	20%	naik 20%	naik	naik 40%	naik 50%			

No	SUBSTANSI INTI / KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PAGU (Rp.MILIAR)	K/L
				2010	2011	2012	2013	2014	Total	
			kompetensi			30%				

PRIORITAS 8	PROGRAM AKSI DI BIDANG ENERGI
TEMA PRIORITAS	<i>Pencapaian ketahanan energi nasional yang menjamin kelangsungan pertumbuhan nasional melalui restrukturisasi kelembagaan dan optimasi pemanfaatan energi alternatif seluas-luasnya</i>
PENANGGUNGJAWAB	Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral
BEKERJASAMA DENGAN	Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara; Menteri Negara Riset dan Teknologi; Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal; Kepala Badan Pertanahan Nasional

No	SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PAGU (Rp Milyar)	K/L
				2010	2011	2012	2013	2014	TOTAL	
1. KEBIJAKAN:										
Penetapan kebijakan energi yang memastikan penanganan energi nasional yang terintegrasi sesuai dengan Rencana Induk Energi Nasional										
a	Penyediaan dan Pengelolaan EBI dan Pelaksanaan Konservasi Energi	Terwujudnya penyediaan dan pengelolaan EBI dan konservasi energi	Jumlah regulasi	7	5	3	4	3	13,05	KESDM
b	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen LPE	Pelayanan yang optimal baik administratif/ teknis untuk pelaksanaan tupoksi DJPLE	Jumlah aturan perundang-undangan: PP	3	3				50,0	KESDM
			RPP	3						
			Aturan lain		3	6	6	6		
c	Penyusunan Kebijakan dan Program serta Evaluasi	Terpenuhinya kebijakan tenaga listrik dan meningkatnya rasio	Jumlah perencanaan ketenagalistrikan	7	7	7	7	8	172,4	KESDM

No	SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PAGU (Rp Milyar)	K/L
				2010	2011	2012	2013	2014	TOTAL	
	Pelaksanaan Kebijakan Ketenagalistrikan	elektrifikasi								
d	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan bidang percepatan penyediaan dan pemanfaatan Energi Alternatif	Meningkatnya Koordinasi dan sinkronisasi implementasi kebijakan percepatan penyediaan dan pemanfaatan energi alternatif	Persentase rekomendasi hasil Kebijakan bidang percepatan penyediaan dan pemanfaatan energi alternatif yang terimplementasi	50%	60%	70%	80%	90%	30,0	Kemenko Perekonomian
e	Koordinasi Pengembangan Kebijakan Pengembangan Bahan Bakar Nabati	Meningkatnya koordinasi kebijakan pengembangan bahan bakar nabati	Persentase rekomendasi hasil koordinasi kebijakan bidang pengembangan bahan bakar nabati yang diimplementasikan	40%	50%	60%	70%	75%	4,65	Kemenko Perekonomian
f	Koordinasi Pengembangan Desa Mandiri Energi	Meningkatnya koordinasi pengembangan desa mandiri energi	Persentase rekomendasi hasil koordinasi kebijakan desa mandiri energi yang ditindaklanjuti	40%	50%	60%	65%	70%	5,70	Kemenko Perekonomian
g	Dukungan pelaksanaan program prioritas Pemerintah bidang energi	Tersusunnya paket regulasi di bidang energi	Risalah Surat Laporan	5 1 5	5 1 5	5 1 5	5 1 5	5 1 5	13,75	Kemeneg BUMN
2. RESTRUKTURISASI BUMN:										
Transformasi dan konsolidasi BUMN bidang energi dimulai dari PLN dan Pertamina yang selesai selambat-lambatnya 2010 dan diikuti oleh BUMN lainnya										
a	Restrukturisasi BUMN besar / penting / strategis	Kajian Restrukturisasi BUMN pelaksanaan Restrukturisasi Monitoring dan Evaluasi	Laporan Laporan Laporan	1 10 6	1 10 6	1 10 6	1 10 6	1 10 6	29,17 20,34 12,7	Kameneg BUMN
3. KAPASITAS ENERGI:										

No	SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PAGU (Rp Milyar)	K/L
				2010	2011	2012	2013	2014	TOTAL	
Peningkatan kapasitas pembangkit listrik sebesar rata-rata 3.000 MW per tahun mulai 2010 dengan rasio elektrifikasi yang mencakup 62% pada 2010 dan 80% pada 2014; dan produksi minyak bumi sebesar lebih dari 1,2 juta barrel per hari mulai 2014										
a	Penyusunan Kebijakan dan Program serta Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Ketenagalistrikan	Terpenuhinya kebutuhan te-naga listrik dan meningkatnya ratio elektrifik-asi.	a. Pembangkit, Jaringan dan Gardu Transmisi							
			- Jumlah Kapasitas pembangkit (MW)	22	37				595,0	KESDM
			- Transmisi (kms)	3.381	4.129	3.881	3.774	4.297	16.094,7	KESDM
			- Gardu Induk	2.159	2.389	2.464	2.603	3.244	9.630,98	KESDM
b. Jaringan dan Gardu Distribusi										
	- Gardu DAN Jaringan (kms/MVA)	18.004 dan 1.266	18.091 dan 1.311	18.960 dan 1.416	19.988 dan 1.548	20.508 dan 1.567	27.483,05	KESDM		
b	Peningkatan produksi minyak bumi	Meningkatnya pengelolaan, pengusahaan dan pembinaan usaha hulu minyak dan gas bumi dan CBM	a. Jumlah Kontrak Kerja Sama Minyak dan gas Bumi dan CBM yang ditawarkan dan ditandatangani	40 KKS Migas dan 10 KKS GMB	40 KKKS Migas dan 10 KKS GMB	40 KKKS Migas dan 10 KKS GMB	40 KKKS Migas dan 10 KKS GMB	40 KKKS Migas dan 10 KKS GMB	117,3	KESDM
			b. Jumlah produksi migas dan CBM	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap	57,9	KESDM
			- Minyak Bumi (MBOPD)	965	970	990	1000	1010(1.200) ¹⁾	-	KESDM
			- Gas Bumi (MBOEPD)	1593	1592	1594	1544	1633	-	KESDM
			- CBM (MBOEPD)	-	-	21,7	61,34	113,21	-	KESDM
c. Jumlah investasi sub sektor minyak dan gas bumi dan CBM (dalam Juta USD)	554 dan 150 dari komitmen 3 tahun pertama	582 dan 160 dari komitmen 3 tahun pertam	609 dan 160 dari komitmen 3 tahun pertama	637 dan 180 dari komitmen 3 tahun pertama	665 dan 180 dari komitmen 3 tahun pertama	7,27	KESDM			

I.M - 101

Catatan: 1) 1,2 Jt adalah target kinerja presiden, sedangkan 1.01 Jt adalah target Renstra KESDM yang diperkirakan dapat dilaksanakan

No	SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PAGU (Rp Milyar)	K/L
				2010	2011	2012	2013	2014	TOTAL	
			d. Jumlah kegiatan eksplorasi dalam upaya mencari cadangan migas baru	Survei Seismik 2D 14.700 km, Survei Seismik 3D 7.975 km ² , Pemboran 63 sumur	Survei Seismik 2D 8.870 km, Survei Seismik 3D 4.500 km ² , Pemboran 88 sumur	Survei Seismik 2D 8.700 km, Survei Seismik 3D 5.650 km ² , Pemboran 69 sumur	Survei Seismik 2D 2.520 km, Survei Seismik 3D 4.420 km ² , Pemboran 34 sumur	Survei Seismik 2D 2.000 km, Survei Seismik 3D 1.000 km ² , Pemboran 45 sumur	59,94	KESDM
			e. Jumlah pelaksanaan Survei Umum di Wilayah Terbuka	Data seismik 2D dan hasil pengolahannya di Lepas Pantai Sulawesi Selatan sepanjang 2000 km	Data seismik 2D dan hasil pengolahannya di Lepas Pantai Timur Indonesia sepanjang 2000 km	Data seismik 2D dan hasil pengolahannya di Lepas Pantai Indonesia Barat Selatan sepanjang 2000 km	Data seismik 2D dan hasil pengolahannya di Lepas Pantai Indonesia Timur sepanjang 2000 km	Data seismik 2D dan hasil pengolahannya di Lepas Pantai Indonesia Barat sepanjang 2000 km	213,68	KESDM
			f. Jumlah kegiatan penyiapan, promosi dan penawaran Wilayah Kerja Baru Migas	8 (delapan) event	9 (sembilan) event	10 (sepuluh) event	11 (sebelas) event	12 (duabelas) event	28,66	KESDM
4. ENERGI ALTERNATIF: Peningkatan pemanfaatan energi terbarukan termasuk energi alternatif geothermal sehingga mencapai 2.000 MW pada 2012 dan 5.000 MW pada 2014 dan dimulainya produksi coal bed methane untuk membangkitkan listrik pada 2011 disertai pemanfaatan potensi tenaga surya, microhydro, bio-energy, dan nuklir secara bertahap										
	ENERGI ALTERNATIF									

No	SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PAGU (Rp Milyar)	K/L
				2010	2011	2012	2013	2014	TOTAL	
a	Peningkatan pemanfaatan energi terbarukan termasuk energi alternatif geothermal sehingga mencapai 2.000 MW pada 2012 dan 5.000 MW pada 2014 dimulainya produksi coal bed methane untuk membangkitkan listrik pada 2011 disertai pemanfaatan potensi tenaga surya	Tercapainya target kontribusi PLTP pada program 10.000 MW tahap II	Jumlah kapasitas PLTP terpasang sebesar 5795 MW di tahun 2014	1.261	1.419	2.260	3.000	5.795	296,4	KESDM
b	Penyediaan Pengelolaan EBT dan Pelaksanaan Konservasi Energi	Terwujudnya penyediaan dan pengelolaan energi baru terbarukan dan konservasi energi	Lisdes (EBT)						-	KESDM PEMDA (DAK)
			- PLTS 50 Wp Tersebar	3,55	24,49	24,59	24,69	24,78	492,6	KESDM - DAK
			- PLTMH (kW)	1,53	10,42	10,9	11,38	11,94	68,96	KESDM - DAK
			- PLT Angin (kW)	0	5,16	5,32	5,55	5,64	-	DAK
			- Biomassa (MW)	0	0,1	0,1	0,1	0,1	-	DAK
			- Jumlah studi kelayakan energi laut (laporan)	1	1	1	1	1	5,00	KESDM
			- Jumlah Pilot project pembangkit listrik dari sumber energi laut	0	1	2	3	4	25,00	KESDM
DME	50	50	50	50	50	300,00	KESDM			
c	Pembinaan dan Penyelenggaraan Usaha Hilir	Peningkatan Kapasitas, kehandalan dan efisiensi	Pembangunan unit pengolahan Biofuel (40 desa terpilih)	unit pengolahan biofuel di 8 desa	unit pengolahan biofuel di 8 desa	unit pengolahan	unit pengolahan	unit pengolahan biofuel di 8	40,00	KESDM

No	SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PAGU (Rp Milyar)	K/L
				2010	2011	2012	2013	2014	TOTAL	
	Migas	infrastruktur sistem penyediaan bahan bakar dan bahan baku industri				biofuel di 8 desa	biofuel di 8 desa	desa		
d	Dukungan Kebijakan Iptek untuk Penciptaan dan Pemanfaatan Sumber Energi Baru dan Terbarukan	Kebijakan peningkatan dukungan iptek untuk penciptaan dan pemanfaatan sumber energi baru dan terbarukan, termasuk koordinasi kebijakan untuk persiapan pembangunan PLTN	Jumlah kebijakan	1	1	1	1	1	25,0	KRT
			Jumlah riset bersama	2	2	2	2	2		
			Paket koordinasi		1	1	1	1	50,0	
e	Pengembangan PLTP Skala Kecil	Termanfaatkannya sistem teknologi pembangkit listrik skala kecil	Jumlah prototype, alih teknologi sistem dan komponen Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi/PLTP (alih teknologi 2 MW)	1	1	1	1	1	177,0	BPPT
f	Penelitian Konversi Energi	Demo <i>pilot plant bio-gasoline</i> dari ligno selulosa	paket	1	1	1	1	1	21,28	LIPI
		Standardisasi teknologi pengujian konversi energi	paket	1	1	1	1	1		
g	Penyusunan Infrastruktur Dasar Pendukung Program Energi Nuklir Nasional	Pemanfaatan potensi tenaga nuklir secara bertahap.	Dokumen Infrastruktur Dasar Pendukung Program Energi Nuklir Nasional	3	3	3	3	3	453,55	BATAN
h	Diseminasi Hasil Litbang Iptek Nuklir	Sosialisasi PLTN	Paket Sosialisasi PLTN (media)	3	3	3	3	3	188,0	

No	SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PAGU (Rp Milyar)	K/L
				2010	2011	2012	2013	2014	TOTAL	
i	Pengelolaan Pertanahan Propinsi	Terwujudnya Pengendalian, Peguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah dan Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka Peningkatan akses terhadap sumber ekonomi	Inventarisasi dan identifikasi tanah terindikasi terlantar (hektar)	75.900	75.900	75.900	75.900	75.900	36,27	BPN
j	Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman Tahunan	Terfasilitasinya pengembangan budidaya tanaman tahunan (kelapa, kelapa sawit, karet, jambu mete, jarak pagar)	<i>Peningkatan luas areal (ribu hektar) pembinaan dan pengembangan tanaman tahunan</i>						437,36	Kementan
			Pengembangan Komoditas Ekspor							
			Karet	3.445	3.456	3.466	3.476	3.487		
			Jambu Mete	573	574	575	576	577		
			<i>Penyediaan bahan tanaman sumber bahan bakar nabati (bio energy)</i>							
			Jarak pagar	10	12	15	18	21		
			Kelapa	3.807	3.814	3.820	3.827	3.833		
			Kelapa Sawit	8.127	8.342	8.557	8.772	8.987		
			Kemiri sunan	1	2	4	7	10		
			Revitalisasi perkebunan							
			Kelapa sawit	125	153	153	153	148		
			Karet	10	53	53	53	51		

No	SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PAGU (Rp Milyar)	K/L
				2010	2011	2012	2013	2014	TOTAL	
			Kakao	0	34	34	34	32		
			<i>Penyusunan kebijakan Pengembangan bio energy</i>							
			Pengembangan integrasi <i>kebun-ternak</i> (paket)	27	28	29	30	31		
5. HASIL IKUTAN DAN TURUNAN MINYAK BUMI / GAS:										
Revitalisasi industri pengolah hasil ikutan/turunan minyak bumi dan gas sebagai bahan baku industri tekstil, pupuk dan industri hilir lainnya										
a	Pengembangan kluster industri berbasis migas, kondesat	Berkembangnya kluster industri berbasis migas	2 Lokasi (Jatim dan Kalimantan)	2	2	2	2	2	29.00	Kemenperin
6. KONVERSI MENUJU PENGGUNAAN GAS:										
Perluasan program konversi minyak tanah ke gas sehingga mencakup 42 juta Kepala Keluarga pada 2010; penggunaan gas alam sebagai bahan bakar angkutan umum perkotaan di Palembang, Surabaya, dan Denpasar										
a	Pembinaan dan Penyelenggaraan Usaha Hilir Migas	Peningkatan kapasitas, kehandalan dan efisiensi infrastruktur sistem penyediaan bahan bakar dan bahan baku industri	Pembangunan LPG miniplant	1 Kajian Pembangunan	1 Kajian Pembangunan	1 unit kilang miniplant LPG			382,00	KESDM
			Pembangunan Jaringan Gas Kota	3 kota/ 16.000 SR	4 kota/ 16.000 SR	4 kota/ 16.000 SR	4 kota/ 16.000 SR	4 kota/ 16.000 SR	1.370,84	KESDM
b	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya DJ Migas	Meningkatnya pembinaan, koordinasi, dan dukungan teknis bagi DJ Migas	Pembangunan SPBG (gas untuk transportasi)	FEED 1 kota	FEED 1 kota / 7 SPBG	FEED 1 kota / 7 SPBG	FEED 1 kota / 7 SPBG	FEED 1 kota	367,20	KESDM

PRIORITAS 9	PROGRAM AKSI BIDANG LINGKUNGAN HIDUP DAN PENGELOLAAN BENCANA
TEMA PRIORITAS	<i>Konservasi dan pemanfaatan lingkungan hidup mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan yang berkelanjutan, disertai penguasaan dan pengelolaan risiko bencana untuk mengantisipasi perubahan iklim</i>
PENANGGUNGJAWAB	Menteri Negara Lingkungan Hidup
BEKERJASAMA DENGAN	Menteri Kehutanan; Menteri Negara Riset dan Teknologi; Menteri Keuangan; Menteri Perdagangan

No	SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PAGU (Rp Milyar)	K/L
				2010	2011	2012	2013	2014	Total	
1. PERUBAHAN IKLIM:										
Peningkatan keberdayaan pengelolaan lahan gambut, peningkatan hasil rehabilitasi seluas 500.000 ha per tahun, dan penekanan laju deforestasi secara sungguh-sungguh diantaranya melalui kerjasama lintas kementerian terkait serta optimalisasi dan efisiensi sumber pendanaan seperti dana luran Hak Pemanfaatan Hutan (IHPH), Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH), dan Dana Reboisasi										
1	Peningkatan keberdayaan pengelolaan lahan gambut									
a.	Penyelenggaraan Rehabilitasi Hutan dan Lahan, dan Reklamasi Hutan di DAS Prioritas	Berkurangnya lahan kritis melalui rehabilitasi dan reklamasi hutan	Fasilitasi rehabilitasi hutan mangrove, gambut dan rawa seluas 295.000 ha	60.000 Ha	120.000 Ha	180.000 Ha	240.000 Ha	295.000 Ha	375 *)Sudah termasuk dalam substansi inti 1.2	Kemenhut

No	SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PAGU (Rp Milyar)	K/L
				2010	2011	2012	2013	2014	Total	
b.	Pengelolaan Kualitas Air dan Kawasan Gambut	Tersedianya perangkat kebijakan pengelolaan kualitas ekosistem gambut, yang terpadu dan bersifat lintas K/L, antara lain dengan Kemen PU, Kemenhut, Kementan, dan Pemda	Penyelesaian pemetaan kesatuan hidrologi gambut di 8 provinsi yang terkoordinasi dengan K/L terkait Verifikasi karakteristik ekosistem gambut di 5 provinsi yang terkoordinasi antar K/L terkait	20%	40%	60%	80%	100%	53,0	KLH
				1	8	8	8	8		
2	Peningkatan hasil rehabilitasi seluas 500,000 ha per tahun									
a.	Penyelenggaraan Rehabilitasi Hutan dan Lahan, dan Reklamasi Hutan di DAS Prioritas	Berkurangnya lahan kritis melalui rehabilitasi dan reklamasi hutan	Fasilitasi dan pelaksanaan rehabilitasi hutan pada DAS prioritas seluas 800 ribu ha	160.000 Ha	320.000 Ha	480.000 Ha	640.000 Ha	800.000 Ha	8,222.5	Kemenhut
			Fasilitasi rehabilitasi lahan kritis pada DAS prioritas seluas 500 ribu ha	100.000 Ha	200.000 Ha	300.000 Ha	400.000 Ha	500.000 Ha		
			Fasilitasi pengembangan hutan kota seluas 5 ribu ha	1.000 Ha	2.000 Ha	3.000 Ha	4.000 Ha	5.000 Ha		
			Fasilitasi rehabilitasi hutan mangrove, gambut dan rawa seluas 295.000 ha	60.000 Ha	120.000 Ha	180.000 Ha	240.000 Ha	295.000 Ha		
b.	Pengembangan Perhutanan Sosial	Meningkatnya pengelolaan hutan melalui pemberdayaan masyarakat	Fasilitasi penetapan areal kerja pengelolaan hutan kemasyarakatan (HKm) seluas 2 juta ha	400.000 ha	800.000 ha	1.200.000 ha	1.600.000 ha	2.000.000 ha	6,239.2	Kemenhut
			Fasilitasi 500 kelompok/unit ijin usaha pengelolaan HKm	100 klpk	200 klpk	300 klpk	400 klpk	500 klpk		

No	SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PAGU (Rp Milyar)	K/L
				2010	2011	2012	2013	2014	Total	
			Fasilitasi 50 unit kemitraan usaha HKm	10 Unit	20 Unit	30 Unit	40 Unit	50 Unit		
			Fasilitasi dukungan kelembagaan ketahanan pangan di 32 provinsi	4 Prov	8 Prov	16 Prov	22 Prov	32 Prov		
			Fasilitasi pembangunan hutan rakyat Kemitraan untuk bahan baku kayu industri pertukangan seluas 250.000 ha	50.000 ha	100.000 ha	150.000 ha	200.000 ha	250.000 ha		
			Fasilitasi pembentukan dan berfungsinya sentra HHBK Unggulan di 30 kabupaten	6 Kab	12 Kab	18 Kab	24 Kab	30 Kab		
			Areal kerja hutan desa seluas 500.000 ha	100.000 ha	200.000 ha	300.000 ha	400.000 ha	500.000 ha		
c.	Peningkatan Konservasi dan Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan	Meningkatnya kualitas kebijakan konservasi dan pengendalian kerusakan hutan dan lahan yang terpadu dan bersifat lintas K/L, antara lain dengan Kemenhut, BPN dan Pemda	Jumlah kebijakan konservasi dan pengendalian kerusakan hutan dan lahan yang ditetapkan/ diterbitkan (kriteria dan pedoman) yang terkoordinasi antar K/L dan daerah terkait	3	3	3	3	3	143,3	KLH
			Data sebaran hotspot di 8 Provinsi rawan kebakaran hutan dan lahan yang didiseminasi ke K/L dan daerah terkait	80%	80%	80%	80%	80%		
			Diterapkannya mekanisme pencegahan kebakaran hutan dan lahan di 8 Provinsi rawan kebakaran hutan dan lahan yang terkoordinasi antar K/L dan daerah	8	8	8	8	8		
			Data kondisi kerusakan hutan dan lahan pada 11 DAS prioritas dan berpotensi rawan longsor yang terkoordinasi antar K/L terkait	80%	80%	80%	80%	80%		
			Data tutupan lahan dan perubahan penggunaan lahan (<i>land</i>	100%	100%	100%	100%	100%		

No	SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PAGU (Rp Milyar)	K/L
				2010	2011	2012	2013	2014	Total	
			<i>use change</i>) melalui Program Menuju Indonesia Hijau							
			Jumlah provinsi (pendekatan ekosistem) yang dipantau sesuai data potensi dan kejadian bencana	10	15	20	25	30		
			% rekomendasi kebijakan konservasi dan pengendalian kerusakan hutan dan lahan yang diimplementasikan daerah dari jumlah propinsi yang dipantau setiap tahunnya	50%	50%	50%	50%	50%		
c.	Pengawasan dan Evaluasi Pemanfaatan Ruang	Terlaksananya pengawasan pemanfaatan ruang dan evaluasi pemanfaatan ruang berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan yang terpadu dan bersifat lintas K/L	% penyelesaian dokumen konsep, naskah akademis, pedoman dan peraturan perundang-undangan berkaitan dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan [dari 12 dokumen yang direncanakan] yang terkoordinasi antar K/L	16,7%	41,7%	58,3%	83,3%	100%	95,7	KLH
			% penyelesaian dokumen pedoman kebijakan pengawasan pemanfaatan ruang berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan [dari 5 dokumen yang direncanakan] yang terkoordinasi antar K/L	20%	40%	60%	80%	100%		
			% penyelesaian kajian daya dukung 4 pulau besar yang terkoordinasi antar K/L	0	25%	50%	75%	100%		
			% penyelesaian kajian penyimpangan pemanfaatan ruang dan dampaknya terhadap lingkungan kerusakan dan bencana [dari 20 lokasi yang direncanakan] dan didiseminasi kepada K/L dan daerah terkait	0	25%	50%	75%	100%		
			% penerapan instrumen daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dalam perencanaan ruang dan evaluasi pemanfaatan ruang di kabupaten dan propinsi [dari 11	6,7%	26,7%	46,7%	66,7%	100%		

No	SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PAGU (Rp Milyar)	K/L
				2010	2011	2012	2013	2014	Total	
			kabupaten dan 4 propinsi yang direncanakan] yang terkoordinasi antar K/L dan daerah							
			% penerapan instrumen daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup di wilayah ekoregion yang terkoordinasi antar K/L dan daerah	0	25%	50%	75%	100%		
			Jumlah provinsi dilaksanakannya pengawasan dan evaluasi pemanfaatan ruang dan alih fungsi lahan/ ruang dan pelaksanaan instrumen pengawasan pemanfaatan ruang dan kawasan lahan gambut, hutan dan DAS prioritas untuk menunjang pencapaian Prioritas Nasional 9 RPJMN 2010-2014	2	33	33	33	33		
			% PPLHD yang ditingkatkan kapasitasnya dalam pengawasan pemanfaatan ruang [dari 250 orang PPLHD yang direncanakan]	10%	33%	55%	78%	100%		
d.	Pengelolaan dan Pengembangan Konservasi Kawasan dan Jenis	Terkelolanya 20% kawasan ekosistem terumbu karang, lamun, mangrove dan 15 jenis biota perairan yang terancam punah	Kawasan konservasi laut dan kawasan konservasi perairan tawar dan payau yang dikelola secara berkelanjutan seluas 4,5 juta ha	900 ribu ha	900 ribu ha	900 ribu ha	900 ribu ha	900 ribu ha	745,46	KKP
			Jumlah kawasan konservasi dan jenis biota perairan dilindungi yang diidentifikasi dan dipetakan secara akurat.	9 Kawasan dan 3 jenis	9 Kawasan dan 3 jenis	9 Kawasan dan 3 jenis	9 Kawasan dan 3 jenis	9 Kawasan dan 3 jenis		
3	Penekanan laju deforestasi secara sungguh-sungguh diantaranya melalui kerjasama lintas kementerian terkait serta optimalisasi dan efisiensi sumber pendanaan seperti dana luran Hak Pemanfaatan Hutan (IHPH), Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH), dan Dana Reboisasi									

No	SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PAGU (Rp Milyar)	K/L
				2010	2011	2012	2013	2014	Total	
a.	Penyelenggaraan Rehabilitasi Hutan dan Lahan, dan Reklamasi Hutan di DAS Prioritas	Berkurangnya lahan kritis melalui rehabilitasi dan reklamasi hutan	Fasilitasi dan pelaksanaan rehabilitasi hutan pada DAS prioritas seluas 800 ribu ha	160.000 Ha	320.000 Ha	480.000 Ha	640.000 Ha	800.000 Ha	*)Sudah termasuk dalam substansi inti 1.2	Kemenhut
			Fasilitasi rehabilitasi lahan kritis pada DAS prioritas seluas 500 ribu ha	100.000 Ha	200.000 Ha	300.000 Ha	400.000 Ha	500.000 Ha		
			Fasilitasi pengembangan hutan kota seluas 5 ribu ha	1.000 Ha	2.000 Ha	3.000 Ha	4.000 Ha	5.000 Ha		
			Fasilitasi rehabilitasi hutan mangrove, gambut dan rawa seluas 295.000 ha	60.000 Ha	120.000 Ha	180.000 Ha	240.000 Ha	295.000 Ha		
b.	Peningkatan Konservasi dan Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan	Meningkatnya kualitas kebijakan konservasi dan pengendalian kerusakan hutan dan lahan yang terpadu dan bersifat lintas K/L, antara lain dengan Kemenhut, BPN dan Pemda	Jumlah kebijakan konservasi dan pengendalian kerusakan hutan dan lahan yang ditetapkan/ diterbitkan (kriteria dan pedoman) yang terkoordinasi antar K/L dan daerah terkait	3	3	3	3	3	*)Sudah termasuk dalam substansi inti 1.2	KLH
			Data sebaran hotspot di 8 Provinsi rawan kebakaran hutan dan lahan yang diseminasi ke K/L dan daerah terkait	80%	80%	80%	80%	80%		
			Diterapkannya mekanisme pencegahan kebakaran hutan dan lahan di 8 Provinsi rawan kebakaran hutan dan lahan yang terkoordinasi antar K/L dan daerah	8	8	8	8	8		
			Data kondisi kerusakan hutan dan lahan pada 11 DAS prioritas dan berpotensi rawan longsor yang terkoordinasi antar K/L terkait	80%	80%	80%	80%	80%		
			Data tutupan lahan dan perubahan penggunaan lahan (<i>land</i>	100%	100%	100%	100%	100%		

No	SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PAGU (Rp Milyar)	K/L
				2010	2011	2012	2013	2014	Total	
			<i>use change</i>) melalui Program Menuju Indonesia Hijau							
			Jumlah provinsi (pendekatan ekosistem) yang dipantau sesuai data potensi dan kejadian bencana	10	15	20	25	30		
			% rekomendasi kebijakan konservasi dan pengendalian kerusakan hutan dan lahan yang diimplementasikan daerah dari jumlah propinsi yang dipantau setiap tahunnya	50%	50%	50%	50%	50%		
c	Pengawasan dan Evaluasi Pemanfaatan Ruang	Terlaksananya pengawasan pemanfaatan ruang dan evaluasi pemanfaatan ruang berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan yang terpadu dan bersifat lintas K/L	% penyelesaian dokumen konsep, naskah akademis, pedoman dan peraturan perundang-undangan berkaitan dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan [dari 12 dokumen yang direncanakan] yang terkoordinasi antar K/L	16,7%	41,7%	58,3%	83,3%	100%	*)Sudah termasuk dalam substansi inti 1.2	KLH
			% penyelesaian dokumen pedoman kebijakan pengawasan pemanfaatan ruang berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan [dari 5 dokumen yang direncanakan] yang terkoordinasi antar K/L	20%	40%	60%	80%	100%		
			% penyelesaian kajian daya dukung 4 pulau besar yang terkoordinasi antar K/L	0	25%	50%	75%	100%		
			% penyelesaian kajian penyimpangan pemanfaatan ruang dan dampaknya terhadap lingkungan kerusakan dan bencana [dari 20 lokasi yang direncanakan] dan didiseminasi kepada K/L dan daerah terkait	0	25%	50%	75%	100%		
			% penerapan instrumen daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dalam perencanaan ruang dan evaluasi pemanfaatan ruang di kabupaten dan propinsi [dari 11	6,7%	26,7%	46,7%	66,7%	100%		

No	SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PAGU (Rp Milyar)	K/L
				2010	2011	2012	2013	2014	Total	
			kabupaten dan 4 propinsi yang direncanakan] yang terkoordinasi antar K/L dan daerah							
			% penerapan instrumen daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup di wilayah ekoregion yang terkoordinasi antar K/L dan daerah	0	25%	50%	75%	100%		
			Jumlah provinsi dilaksanakannya pengawasan dan evaluasi pemanfaatan ruang dan alih fungsi lahan/ ruang dan pelaksanaan instrumen pengawasan pemanfaatan ruang dan kawasan lahan gambut, hutan dan DAS prioritas untuk menunjang pencapaian Prioritas Nasional 9 RPJMN 2010-2014	2	33	33	33	33		
			% PPLHD yang ditingkatkan kapasitasnya dalam pengawasan pemanfaatan ruang [dari 250 orang PPLHD yang direncanakan]	10%	33%	55%	78%	100%		
d.	Penguatan Kebijakan Iptek dan Dukungan Litbang untuk Penurunan Emisi gas CO2 dan Adaptasi Perubahan Iklim	Kebijakan dukungan litbang untuk penurunan emisi gas CO2 dan adaptasi perubahan iklim	Jumlah kebijakan	5	5	5	5	5	49,00	KRT
			Jumlah riset bersama	5	5	5	5	5		
2. PENGENDALIAN KERUSAKAN LINGKUNGAN:										
Pengendalian Kerusakan Lingkungan: Penurunan beban pencemaran lingkungan melalui pengawasan ketaatan pengendalian pencemaran air limbah dan emisi di 680 kegiatan industri dan jasa pada 2010 dan terus berlanjut; penurunan jumlah hotspot kebakaran hutan sebesar 20% per tahun dan penurunan tingkat polusi keseluruhan sebesar 50% pada 2014; penghentian kerusakan lingkungan di 11 Daerah Aliran Sungai yang rawan bencana mulai 2010 dan seterusnya										
1	Penurunan beban pencemaran lingkungan melalui pengawasan ketaatan pengendalian pencemaran air limbah dan emisi di 680 kegiatan industri									

No	SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PAGU (Rp Milyar)	K/L
				2010	2011	2012	2013	2014	Total	
	dan jasa pada 2010 dan terus berlanjut;									
a.	Pengendalian Pencemaran Air	Menurunnya beban pencemar air dari industri yang dipantau dan diawasi	Jumlah industri pertambangan, energi dan migas yang dipantau dan diawasi	200	205	210	215	220	142,0	KLH
			Jumlah agroindustri yang dipantau dan diawasi	220	220	225	235	245		
			Jumlah industri manufaktur yang dipantau dan diawasi	260	296	310	320	330		
			Jumlah industri yang taat terhadap peraturan LH	480	555	606	660	720		
			Jumlah izin pembuangan air limbah ke laut yang dikeluarkan	20	20	20	20	20		
			Jumlah pedoman teknis/peraturan perundang-undangan	2	6	6	6	6		
b.	Pengendalian Pencemaran Udara	Menurunnya beban pencemar udara dari industri yang dipantau dan diawasi	Jumlah industri pertambangan, energi dan migas yang dipantau dan diawasi	200	205	210	215	220	120,84	KLH
			Jumlah agroindustri yang dipantau dan diawasi	220	220	225	235	245		
			Jumlah industri manufaktur yang dipantau dan diawasi	260	296	310	320	330		
			Jumlah industri yang taat terhadap peraturan LH	480	555	606	660	720		
			Jumlah penurunan beban pencemar udara dari industri yang dipantau dan diawasi	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%		
			Jumlah pedoman teknis/peraturan perundang-undangan	2	6	6	6	6		
c.	Pengelolaan B3 dan Limbah B3 Kegiatan Pertambangan, Energi, Minyak dan Gas	Meningkatnya kebijakan dan penataan pengelolaan B3 dan limbah B3 serta meningkatnya jumlah limbah B3 yang dikelola dalam kegiatan pertambangan, energi, minyak dan gas	Jumlah produk perumusan kebijakan dan/atau standar dan/atau pedoman pengelolaan B3 & limbah B3 kegiatan pertambangan, energi, minyak dan gas [Draft Permen LH]	1	1	1	1	1	106,0	KLH
			Jumlah kegiatan pemantauan dan/atau analisis dan/atau evaluasi pelaksanaan kebijakan pengelolaan B3 & limbah B3	1	1	1	1	1		

No	SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PAGU (Rp Milyar)	K/L
				2010	2011	2012	2013	2014	Total	
			kegiatan pertambangan, energi, minyak dan gas							
			Jumlah perusahaan yang mendapat pengawasan kinerja penerapan pengelolaan B3 & limbah B3 kegiatan pertambangan, energi, minyak dan gas	200	205	210	215	220		
			Jumlah daerah dan/ atau perusahaan yang mendapat bimbingan teknis pengelolaan B3 & limbah B3 kegiatan pertambangan, energi, minyak dan gas	5	10	10	10	10		
			Jumlah lingkup kegiatan dari seluruh ketentuan konvensi internasional pengelolaan B3 dan Limbah B3 yang ada	3	4	4	4	4		
d.	Pengelolaan B3 dan Limbah B3 Manufaktur, Agro industri dan Jasa	Meningkatnya kebijakan dan pertimbangan teknis dalam pengawasan penerapan pengelolaan limbah B3 serta meningkatnya jumlah limbah B3 yang dikelola dalam kegiatan manufaktur, agroindustri dan jasa	Jumlah kebijakan, pedoman teknis yang diterapkan dalam Pengelolaan Limbah B3 pada kegiatan manufaktur dan agroindustri [dalam bentuk pedoman]	2	2	2	2	2	107,83	KLH
			Jumlah pengawasan kinerja industri yang dilakukan pembinaan dan pengawasan	480	516	535	555	575		
			Jumlah daerah dan/ atau perusahaan yang mendapat bimbingan teknis pengelolaan B3 dan limbah B3 kegiatan manufaktur agroindustri dan jasa	5	10	10	10	10		
			Jumlah lingkup kegiatan dalam pelaksanaan ketentuan konvensi internasional pengelolaan B3 dan Limbah B3 (dari seluruh ketentuan Internasional yang ada)	4	4	4	4	4		
e.	Administrasi Pengelolaan B3 dan Limbah B3	Meningkatnya penerapan pengelolaan bahan dan limbah B3	Jumlah kebijakan/ pedoman/ standar/ data base yang dihasilkan dalam rangka kegiatan administrasi pengelolaan B3 & limbah B3 [Permen LH dan pedoman]	2	3	3	3	3	88,80	KLH

No	SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PAGU (Rp Milyar)	K/L
				2010	2011	2012	2013	2014		
			Jumlah registrasi B3 dan rekomendasi, ijin dan notifikasi pengelolaan limbah B3	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
			Jumlah propinsi yang mendapat bimbingan teknis administrasi, pengelolaan B3 dan limbah B3	5	33	33	33	33		
			Jumlah kegiatan dalam pelaksanaan ketentuan konvensi internasional pengelolaan B3 dan Limbah B3 (dari seluruh ketentuan Internasional yang ada)	4	4	4	4	4		
f.	Penelitian Oseanografi	Pengembangan Sistem Informasi dan penelitian Kerusakan terumbu karang	Paket informasi dasar	3	3	3	3	3	70,40	LIPI
2	Penurunan jumlah hotspot kebakaran hutan sebesar 20% per tahun									
a.	Pengendalian kebakaran hutan	Meningkatkan sistem pencegahan pemadaman, penanggulangan, dampak kebakaran hutan dan lahan	Hotspot di Pulau Kalimantan, Pulau Sumatera, dan Pulau Sulawesi berkurang 20% setiap tahun.	20%	36%	48,8%	59,2%	67,2%	1.275,00	Kemenhut
			Luas kawasan hutan yang terbakar ditekan hingga 50% dibandingkan kondisi tahun 2008	10%	20%	30%	40%	50%		
b.	Peningkatan Konservasi dan Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan	Tersedianya kebijakan, data dan informasi untuk pengendalian kebakaran hutan dan lahan yang terpadu dan terkoordinasi dengan K/L terkait	Tersedianya data sebaran hotspot di 8 Provinsi rawan kebakaran hutan dan lahan yang didiseminasikan ke K/L dan daerah terkait, sebagai indikator keberhasilan pelaksanaan mekanisme pencegahan kebakaran hutan	80%	80%	80%	80%	80%	31,96	KLH
									* Merupakan bagian dari total pagu kegiatan dalam substansi inti 1.2	

No	SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PAGU (Rp Milyar)	K/L
				2010	2011	2012	2013	2014	Total	
3	Penurunan tingkat polusi keseluruhan sebesar 50% pada 2014									
a.	Pengendalian Pencemaran Udara	Menurunnya beban pencemar udara dari industri yang dipantau dan diawasi	Jumlah industri pertambangan, energi dan migas yang dipantau dan diawasi	200	205	210	215	220	* Sudah termasuk dalam substansi inti 2.1	KLH
			Jumlah agroindustri yang dipantau dan diawasi	220	220	225	235	245		
			Jumlah industri manufaktur yang dipantau dan diawasi	260	296	310	320	330		
			Jumlah industri yang taat terhadap peraturan LH	480	555	606	660	720		
			Jumlah penurunan beban pencemar udara dari industri yang dipantau dan diawasi	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%		
			Jumlah pedoman teknis/ peraturan perundang-undangan	2	6	6	6	6		
b.	Pengendalian Pencemaran Udara dari Emisi dan Kebisingan Kendaraan Bermotor	Menurunnya emisi dan kebisingan dari kendaraan di prioritas kota-kota yang dipantau	Jumlah peraturan perundangan yang ditetapkan	2	10	7	10	8	104,8	KLH
			Jumlah daerah (provinsi/ kota) yang difasilitasi dalam penyusunan Peraturan Daerah tentang pengendalian pencemaran udara khususnya sumber bergerak	4	8	8	8	8		
			Jumlah kota yang difasilitasi dalam penerapan pemeriksaan emisi dan perawatan kendaraan bermotor (P&P)	4	8	8	8	8		
			Jumlah kebijakan sektor yang difasilitasi dalam mendukung reduksi emisi (penetapan standar emisi dan kebisingan, bahan bakar, manajemen transportasi, kendaraan tidak bermotor (NMT), uji emisi bagi kendaraan pribadi, <i>land use planning</i>)	2	2	2	2	2		

No	SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PAGU (Rp Milyar)	K/L
				2010	2011	2012	2013	2014	Total	
			Jumlah kota yang dievaluasi kualitas udaranya	16	20	24	28	36		
			Jumlah pembinaan teknis dalam pengendalian pencemaran sumber bergerak	5	5	5	5	5		
c.	Pengendalian Pencemaran Air	Menurunnya beban pencemar air dari industri yang dipantau dan diawasi	Jumlah industri pertambangan, energi dan migas yang dipantau dan diawasi	200	205	210	215	220	* Sudah termasuk dalam substansi inti 2.1	KLH
			Jumlah agroindustri yang dipantau dan diawasi	220	220	225	235	245		
			Jumlah industri manufaktur yang dipantau dan diawasi	260	296	310	320	330		
			Jumlah industri yang taat terhadap peraturan LH	480	555	606	660	720		
			Jumlah izin pembuangan air limbah ke laut yang dikeluarkan	20	20	20	20	20		
			Jumlah pedoman teknis/peraturan perundang-undangan	2	6	6	6	6		
d.	Pengelolaan B3 dan Limbah B3 Kegiatan Pertambangan, Energi, Minyak dan Gas	Meningkatnya kebijakan dan penerapan pengelolaan B3 dan limbah B3 serta meningkatnya jumlah limbah B3 yang dikelola dalam kegiatan pertambangan, energi, minyak dan gas	Jumlah produk perumusan kebijakan dan/atau standar dan/atau pedoman pengelolaan B3 & limbah B3 kegiatan pertambangan, energi, minyak dan gas [Draft Permen LH]	1	1	1	1	1	* Sudah termasuk pagu 2.1	KLH
			Jumlah kegiatan pemantauan dan/atau analisis dan/atau evaluasi pelaksanaan kebijakan pengelolaan B3 & limbah B3 kegiatan pertambangan, energi, minyak dan gas	1	1	1	1	1		
			Jumlah perusahaan yang mendapat pengawasan kinerja penerapan pengelolaan B3 & limbah B3 kegiatan pertambangan, energi, minyak dan gas	200	205	210	215	220		
			Jumlah daerah dan/ atau perusahaan yang mendapat bimbingan teknis pengelolaan B3 & limbah B3 kegiatan pertambangan, energi, minyak dan gas	5	10	10	10	10		

No	SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PAGU (Rp Milyar)	K/L
				2010	2011	2012	2013	2014	Total	
			Jumlah lingkup kegiatan dari seluruh ketentuan konvensi internasional pengelolaan B3 dan Limbah B3 yang ada	3	4	4	4	4		
e.	Pengelolaan B3 dan Limbah B3 Manufaktur, Agro industri dan Jasa	Meningkatnya kebijakan dan pertimbangan teknis dalam pengawasan penataan pengelolaan limbah B3 serta meningkatnya jumlah limbah B3 yang dikelola dalam kegiatan manufaktur, agroindustri dan jasa	Jumlah kebijakan, pedoman teknis yang diterapkan dalam Pengelolaan Limbah B3 pada kegiatan manufaktur dan agroindustri [dalam bentuk pedoman]	2	2	2	2	2	* Sudah termasuk pagu 2.1	KLH
			Jumlah pengawasan kinerja industri yang dilakukan pembinaan dan pengawasan	480	516	535	555	575		
			Jumlah daerah dan/ atau perusahaan yang mendapat bimbingan teknis pengelolaan B3 dan limbah B3 kegiatan manufaktur agroindustri dan jasa	5	10	10	10	10		
			Jumlah lingkup kegiatan dalam pelaksanaan ketentuan konvensi internasional pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah B3 (dari seluruh ketentuan Internasional yang ada)	4	4	4	4	4		
f.	Administrasi Pengelolaan B3 dan Limbah B3	Meningkatnya penataan pengelolaan bahan dan limbah B3	Jumlah kebijakan/ pedoman/ standar/ data base yang dihasilkan dalam rangka kegiatan administrasi pengelolaan B3 & limbah B3 [Permen LH dan pedoman]	2	3	3	3	3	* Sudah termasuk pagu 2.1	KLH
			Jumlah registrasi B3 dan rekomendasi, ijin dan notifikasi pengelolaan limbah B3	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
			Jumlah propinsi yang mendapat bimbingan teknis administrasi, pengelolaan B3 dan limbah B3	5	33	33	33	33		
			Jumlah kegiatan dalam pelaksanaan ketentuan konvensi internasional pengelolaan B3 dan Limbah B3 (dari seluruh	4	4	4	4	4		

No	SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PAGU (Rp Milyar)	K/L
				2010	2011	2012	2013	2014	Total	
			ketentuan Internasional yang ada)							
g.	Penanganan Kasus Lingkungan	Meningkatnya kualitas penanganan kasus lingkungan	% pengaduan masyarakat yang dikelola melalui penerimaan, penelaahan dan klasifikasi, penerusan kepada pihak terkait yang berwenang, atau ditangani langsung	100%	100%	100%	100%	100%	89,65	KLH
			% dugaan tindak pidana LH yang ditindaklanjuti melalui proses penyelidikan dan penyidikan (pulbaket) sampai proses pengadilan [perkiraan 100 kasus per tahun]	80%	85%	90%	95%	100%		
			% penanganan kasus perdata LH yang ditindaklanjuti secara perdata di dalam maupun di luar pengadilan [perkiraan 100 kasus per tahun]	80%	85%	90%	95%	100%		
			Jumlah kasus lingkungan yang terevaluasi dan tereksaminasi	2	4	4	4	4		
h.	Peningkatan Instrumen Ekonomi dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup	Meningkatkan kualitas kebijakan insentif dan pendanaan lingkungan dalam pengelolaan lingkungan hidup	Jumlah penerimaan target program pinjaman lunak terhadap % jumlah UMKM yang mengajukan permohonan pinjaman	90%	90%				96,5	KLH
			% telaahan teknis diterima menjadi rekomendasi teknis pinjaman lunak lingkungan (90-100 proposal per tahun)	80%	80%					
			% jumlah pemantauan terhadap UMKM yang telah mendapat pinjaman yang sudah jatuh tempo	80%	80%	80%	80%	80%		
			Jumlah pedoman dan fasilitas teknis yang terkait dengan valuasi ekonomi SDA dan LH	5	5	6	6	6		
			Jumlah dokumen tentang bahan rumusan kebijakan insentif dan pendanaan lingkungan	4	4	4	4	4		

No	SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PAGU (Rp Milyar)	K/L
				2010	2011	2012	2013	2014	Total	
			% Bimbingan teknis pengembangan instrument ekonomi dan perhitungan PDRB Hijau di daerah iklim	100%	100%	100%	100%	100%		
i.	Peningkatan Operasional Pengawasan Sumber Daya Perikanan	Meningkatnya usaha perikanan yang sesuai ketentuan	Jumlah usaha penangkapan ikan di wilayah bagian barat yang sesuai ketentuan Jumlah usaha penangkapan ikan di wilayah bagian timur yang sesuai ketentuan	280 kapal	880 kapal	1.480 kapal	2.080 kapal	2.680 kapal	170,10	KKP
j.	Peningkatan Operasional Pengawasan Sumber Daya Kelautan	Meningkatnya wilayah perairan Indonesia yang bebas kegiatan ilegal dan merusak	Jumlah wilayah perairan yang bebas kegiatan perusakan ekosistem perairan Jumlah wilayah perairan yang bebas kegiatan pencemaran	4 wilayah	9 wilayah	15 wilayah	21 wilayah	27 wilayah	86,95	KKP
4	Penghentian kerusakan lingkungan di 13 Daerah Aliran Sungai yang rawan bencana mulai 2010 dan seterusnya									
a.	Pembinaan Penyelenggaraan Pengelolaan DAS	Terselenggaranya pengelolaan DAS secara terpadu pada DAS prioritas	Rencana pengelolaan DAS terpadu di 108 DAS prioritas Terbangunnya base line data pengelolaan DAS di 36 BPDAS Tersedianya data dan peta lahan kritis di 36 BPDAS	22 DAS	44 DAS	66 DAS	88 DAS	108 DAS	721,9	Kemenhut
b.	Pengelolaan Kualitas Air dan Kawasan Gambut	Tersedianya perangkat kebijakan	% penyiapan penetapan kelas air di tingkat kabupaten/ kota	25%	25%	20%	20%	10%	97,54	KLH

No	SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PAGU (Rp Milyar)	K/L		
				2010	2011	2012	2013	2014	Total			
		pengelolaan kualitas air yang terpadu dan bersifat lintas K/L	untuk 13 sungai-sungai prioritas dari 119 kab/kota, yang terkoordinasi lintas K/L dan daerah Jumlah pembinaan teknis pengelolaan kualitas air terhadap 119 kabupaten/ kota di 13 DAS yang terkoordinasi dengan K/L terkait	20%	20%	20%	20%	20%				
3. SISTEM PERINGATAN DINI:												
Penjaminan berjalannya fungsi Sistem Peringatan Dini Tsunami (TEWS) dan Sistem Peringatan Dini Cuaca (MEWS) yang dimulai pada 2010, serta Sistem Peringatan Dini Iklim (CEWS) pada 2013												
a.	Pengelolaan Meteorologi Publik BMKG	Meningkatnya pelayanan data dan informasi meteorologi publik serta peringatan dini cuaca ekstrim	Persentase tingkat kemampuan pelayanan data dan informasi meteorologi publik Persentase tingkat kemampuan pelayanan data dan informasi potensi kebakaran hutan Persentase tingkat kemampuan pelayanan data dan informasi cuaca ekstrim	50%	60%	70%	75%	80%	899,67	BMKG		
			Kesinambungan (sustainabilitas) Ina-TEWS	100%	100%	100%	100%	100%			515,04	BMKG
			Kesinambungan sistem pengamatan di bidang gempabumi dan tsunami	90%	90%	90%	80%	80%				
			Kesinambungan sistem analisa data di bidang gempabumi dan tsunami	90%	90%	90%	90%	90%				
c.	Pengelolaan Iklim Agroklimat dan Iklim Maritim BMKG	Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan data dan informasi di bidang iklim agroklimat dan iklim maritim	Jumlah pelayanan informasi perubahan iklim dan kualitas udara % pengguna informasi perubahan iklim dan kualitas udara	75%	85%	90%	95%	95%				
				75%	80%	85%	90%	90%				

No	SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PAGU (Rp Milyar)	K/L
				2010	2011	2012	2013	2014	Total	
d.	Pemetaan Dasar Kelautan dan Kedirgantaraan	Tersusunnya kebijakan pemetaan dasar kelautan dan kedirgantaraan serta meningkatnya cakupan peta dasar kelautan dan kedirgantaraan	Peta Resmi tingkat peringatan tsunami	2	2	3	4	5	1.9	Bakosurtanal
4. PENANGGULANGAN BENCANA:										
Peningkatan kemampuan penanggulangan bencana melalui: 1) penguatan kapasitas aparatur pemerintah dan masyarakat dalam usaha mitigasi risiko serta penanganan bencana dan bahaya kebakaran hutan di 33 propinsi, dan 2) pembentukan tim gerak cepat (unit khusus penanganan bencana) dengan dukungan peralatan dan alat transportasi yang memadai dengan basis di dua lokasi strategis (Jakarta dan Malang) yang dapat menjangkau seluruh wilayah Indonesia										
1	Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah dan masyarakat dalam usaha pengurangan risiko, mitigasi dan penanganan bencana dan bahaya kebakaran hutan di 33 propinsi									
a.	Pengendalian Kebakaran Hutan	Meningkatkan sistem pencegahan pemadaman, penanggulangan, dampak kebakaran hutan dan lahan	Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah dan masyarakat dalam penanggulangan bahaya kebakaran hutan di 30 DAOPS	6 DAOPS	12 DAOPS	18 DAOPS	24 DAOPS	30 DAOPS	*)Sudah termasuk dalam substansi inti 2.2	Kemehut
b.	Penyiapan Peralatan dan Logistik Dikawasan Rawan Bencana	1. Pemenuhan kebutuhan logistik kebencanaan 2. Pendistribusian logistik kebencanaan pada daerah bencana	1. Terlaksananya pemenuhan kebutuhan logistik kebencanaan 2. Terlaksananya pendistribusian logistik kebencanaan pada daerah bencana	16 Prov	17 Prov	17 Prov	77 kab/kota	77 kab/kota	230,18	BNPB
		1. Pemenuhan kebutuhan peralatan kebencanaan 2. Pendistribusian peralatan kebencanaan pada daerah bencana	1. Terlaksananya pemenuhan kebutuhan peralatan kebencanaan 2. Terlaksananya pendistribusian peralatan kebencanaan pada daerah bencana	16 Prov	17 Prov	17 Prov	77 Kab/Kota	77 Kab/kota	144,82	

No	SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PAGU (Rp Milyar)	K/L
				2010	2011	2012	2013	2014	Total	
c.	Pendayagunaan Pesisir dan Lautan	Terkelolanya 50 Kawasan minapolitan yang tahan terhadap ancaman kerusakan dan mempunyai infrastruktur dasar, serta 3 produk kelautan	Jumlah luasan kawasan pesisir rusak yang pulih kembali.	60 Ha	1.000 Ha	1.100 Ha	1.400 Ha	1.440 Ha	404,6	KKP
			Jumlah ragam dan volume produk kelautan yang dikembangkan							
			BMKT (kapal)	2	3	3	2	2		
			Garam (ribu ton)	50	100	150	100	100		
			Deep sea water (ribu liter)	200	500	1500	2000	3000		
d.	Penelitian dan Pengembangan IPTEK kewilayahan, Dinamika dan Sumber Daya Nonhayati Pesisir dan Laut	Wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil yang teridentifikasi potensi, karakteristik, kebutuhan konservasi SDNHL dan fenomena alamnya serta jumlah rekomendasi pengelolaan dan model pemanfaatannya	Jumlah rekomendasi pengelolaan dan model pemanfaatannya	3	3	3	3	3	260,8	KKP
			Jumlah paket data terkait fenomena alam dan sumberdaya nonhayati	1 paket data terkait fenomena alam, dan 5 paket data terkait SDNH, pesisir	1 paket data terkait fenomena alam, dan 5 paket data terkait SDNH, pesisir	1 paket data terkait fenomena alam, dan 5 paket data terkait SDNH, pesisir	1 paket data terkait fenomena alam, dan 5 paket data terkait SDNH, pesisir	1 paket data terkait fenomena alam, dan 5 paket data terkait SDNH, pesisir		

No	SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PAGU (Rp Milyar)	K/L
				2010	2011	2012	2013	2014	Total	
				dan laut	dan laut	dan laut	dan laut	dan laut		
e.	Pendayagunaan Teknologi dan Pengembangan Kapasitas Untuk Mitigasi Bencana	Kebijakan pendaya-gunaan teknologi mitigasi bencana	Jumlah kebijakan	1	1	1	1	1	49,00	KRT
		Tersusunnya <i>Standard Operation Procedure (SOP)</i>	Jumlah SOP	0	0	0	1	1		
f.	Teknologi Pengendalian dan Mitigasi Dampak Pemanasan Global	Model fisik kolamkultur penyerap CO2, Penyempurnaan dan pengujian peralatan produksi flare	Rekomendasi kebijakan pengurangan emisi dan peningkatan <i>carbon sink</i> dan <i>pilot plant</i> fotobioreaktor untuk penyerap CO2	1	1	1	1	1	14,85	BPPT
g.	Penelitian Geoteknologi	Dokumen ilmiah kontribusi Indonesia untuk perubahan iklim	Paket pengumpulan data	1					10,00	LIPI
			Paket dokumen ilmiah		Draft I	Draft II	Penyempurnaan	Final		
h.	Penelitian Oseanografi	Panduan dan sosialisasi kesiapsiagaan masyarakat	Paket	2	2	2	2	2	17,00	LIPI
i.	Pengembangan Konservasi Tumbuhan Indonesia - Kebun Raya Bogor	Konservasi ex-situ dalam bentuk kebun raya daerah	Kebun raya (paket kawasan)	2	2	3	3	4	25,00	LIPI
j.	Peningkatan Ketersediaan Data dan Informasi Survei Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup Matra Darat	Tersedianya data dan informasi spasial SDA dan LH tematik matra darat.	(1) Jumlah NLP produk inventarisasi, neraca, kebencanaan, kajian aplikasi tekno surta, <i>remote sensing</i> , dinamika geografis dan kajian wilayah, SDA dan LH matra darat yang diatur dan dikelola sebagai basis data pemetaan nasional.	25	50	50	50	50	31.9	Bakosurtanal
			(2) Jumlah akses, diseminasi dan utilitas informasi data spasial tematik SDA dan LH matra darat.	33 Prov 6 K/L	33 Prov 6 K/L	33 Prov 6 K/L	33 Prov 6 K/L	33 Prov 6 K/L	12.7	

No	SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PAGU (Rp Milyar)	K/L
				2010	2011	2012	2013	2014	Total	
k.	Peningkatan Ketersediaan Data dan Informasi Survei Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Matra Laut	Tersedianya data dan informasi spasial SDA dan LH tematik matra laut berupa produk inventarisasi, neraca, kajian aplikasi tekno surta, <i>remote sensing</i> /GIS, dinamika geografis SDA	(1) Jumlah NLP dan tema dan laporan kajian wilayah LH matra laut yang diatur dan dikelola sebagai basis data pemetaan nasional	18 NLP (@5 tema) dan 4 dok	18 NLP (@5 tema) dan 4 dok	18 NLP (@5 tema) dan 4 dok	18 NLP (@5 tema) dan 4 dok	18 NLP (@5 tema) dan 4 dok	46.5	Bakosurtanal
			(2) Jumlah akses, diseminasi dan utilitas informasi data spasial tematik SDA dan LH matra laut	33 Prov, 6 K/L	33 Prov, 6 K/L	33 Prov, 6 K/L	33 Prov, 6 K/L	33 Prov, 6 K/L	13.3	
l.	Penyusunan Atlas Sumberdaya dan Kajian Pengembangan Wilayah.	Tersedianya data dan informasi atlas serta kajian pengembangan wilayah.	(1) Jumlah dokumen kajian model spasial dinamis serta difusi, diseminasi atlas dan kajian pengembangan wilayah.	2	2	2	-	-	93.3	Bakosurtanal
			(2) Jumlah provinsi dan kabupaten untuk pelaksanaan akses, utilitas data dan informasi atlas sumber-daya dan kajian pengembangan wilayah.	14	14	14	14	14	14.5	
m.	Pembangunan Data dan Informasi Geodesi Dan Geodinamika	Tersusunnya rancangan rumusan kebijakan teknis, rencana dan program di bidang pembangunan data dan informasi geodesi dan geodinamika	(1) Jumlah stasiun tetap GPS dan perawatan sistem	78	90	90	100	100	40.5	Bakosurtanal
			(2) Jumlah pembangunan stasiun tetap GPS	12	-	10	-	-	7.0	
			(3) Jumlah pembangunan stasiun pasang surut laut	7	-	-	-	-	3.5	
2	Pembentukan tim gerak cepat (unit khusus penanganan bencana) dengan dukungan alat transportasi yang memadai dengan basis 2 lokasi strategis (Jakarta-Malang) yang dapat menjangkau seluruh wilayah Indonesia									
a	Kesiapagaian dalam Menghadapi Bencana	1. Terlaksananya pendampingan dalam penyusunan rencana kontijensi	1. Jumlah rencana kontijensi yang tersusun; dan 2. Terbentuknya satuan reaksi cepat (SRC-PB)	5	5	5	10	8	157,64	BNPB

No	SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITYAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PAGU (Rp Milyar)	K/L
				2010	2011	2012	2013	2014	Total	
		2. Terlaksananya kesiapsiagaan dengan pembentukan satuan reaksi cepat penanggulangan bencana (SRC-PB)								
b.	Tanggap Darurat di Daerah Terkena Bencana	Koordinasi dan pelaksanaan penanganan tanggap darurat dipusat dan daerah	Terlaksananya koordinasi dan pelaksanaan penanganan tanggap darurat dipusat dan daerah	55	80	125	150	175	137,89	BNPB

PRIORITAS 10	DAERAH TERTINGGAL, TERDEPAN, TERLUAR, DAN PASCA-KONFLIK
TEMA PRIORITAS	<i>Pengutamaan dan penjaminan pertumbuhan di daerah tertinggal, terdepan, terluar serta keberlangsungan kehidupan damai di wilayah pasca-konflik</i>
PENANGGUNGJAWAB	Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
BEKERJSAMA DENGAN	Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal; Menteri Pendidikan Nasional; Menteri Kesehatan; Menteri Pekerjaan Umum; Menteri Perhubungan; Menteri Negara Komunikasi dan Informatika; Menteri Pertahanan; Menteri Kelautan dan Perikanan; Menteri Luar Negeri; Menteri Sosial; Menteri Dalam Negeri; Menteri Pertahanan; Menteri Negara Riset dan Teknologi; Kepala Badan Koordinasi Survey dan Pemetaan Nasional

No	SUBSTANSI INTI/KEGIATAN/ PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PAGU	K/L
				2010	2011	2012	2013	2014	Total	
Substansi Inti 1, KEBIJAKAN : Pelaksanaan kebijakan khusus dalam bidang infrastruktur dan pendukung kesejahteraan lainnya yang dapat mendorong pertumbuhan di daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan pasca-konflik selambat-lambatnya dimulai pada 2011										
1	Pelaksanaan Koordinasi dan Evaluasi Hubungan Multilateral, Wilayah Negara, dan Tata Ruang Pertahanan, serta Koordinasi Pengelolaan Masyarakat Kawasan Tertinggal	Terlaksananya koordinasi dan evaluasi hubungan multilateral, wilayah negara dan tata ruang pertahanan, serta koordinasi penge-lolaan masyarakat kawasan	Jumlah rapat koordinasi	12 kali	12 kali	12 kali	12 kali	12 kali	26,824	Kemenko Polhukam
			Jumlah pemantauan dan evaluasi	4 kali	4 kali	4 kali	4 kali	4 kali		

No	SUBSTANSI INTI/KEGIATAN/ PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PAGU	K/L
				2010	2011	2012	2013	2014	Total	
		tertinggal								
2	Pengembangan kebijakan, koordinasi dan fasilitasi daerah tertinggal di kawasan perbatasan	Meningkatnya koordinasi antar sektor dalam pengembangan daerah tertinggal di kawasan perbatasan	Jumlah rapat koordinasi Jumlah rencana aksi pengembangan daerah tertinggal di kawasan perbatasan yg dilaksanakan	4 27	4 27	4 27	4 27	4 27	147	KPDT
3	Pengembangan dan Penataan Wilayah Administrasi dan Perbatasan	Meningkatnya sar pras dalam pelayanan umum pemerintahan	Prosentase jumlah kab/kota di wilayah perbatasan yang mendapat sarpras perbatasan antar negara	25	50	75	85	100	977,18	Kemendagri
		Meningkatnya kerjasama perbatasan antar negara (SOSEKMALINDO, JBC RI-RDTL, JBC RI-PNG)	Jumlah provinsi yang termasuk ke dalam perbatasan antar negara	6	6	6	6	6		
		Terfasilitasinya penguatan kelembagaan wilayah perbatasan antar negara	Prosentase penguatan kelembagaan di pusat dan daerah dalam rangka penanganan perbatasan antar negara	25	50	75	85	100		
		Meningkatnya kemampuan pengelolaan Pos Lintas Batas (PLB) internasional dan tradisional secara terpadu yang telah disepakati antar negara	Jumlah Pos lintas Batas tradisional dan internasional dengan kualitas manajemen pengelolaan serta fasilitas pendukung yang memadai	3	3	3	3	3		
		17 provinsi/ 100 rute	Jumlah rute yang terseenggara	tersebar			tersebar	tersebar		

No	SUBSTANSI INTI/KEGIATAN/ PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PAGU	K/L
				2010	2011	2012	2013	2014	Total	
4	Pelaksanaan Pemberdayaan dan Pemerataan Pembangunan Sarana dan Prasarana Informatika	Layanan komunikasi dan informatika di wilayah non komersial	▪ Prosentase desa yang dilayani akses telekomunikasi	100%	100%	100%	100%	100%	4.036,42	Kemenkominfo
			▪ Prosentase desa yang dilayani akses internet	5%	20%	40%	60%	80%		
			▪ Prosentase ibukota provinsi yang memiliki regional <i>internet exchange</i>	10%	30%	50%	80%	100%		
			▪ Prosentase ibukota provinsi yang memiliki <i>international internet exchange</i>	10%	30%	50%	80%	100%		
			▪ Jumlah Desa Informasi yang dilengkapi radio komunitas	15 desa	76 desa	200 desa	350 desa	500 desa		
5	Pembinaan pelayanan kesehatan komunitas*	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat	Jumlah puskesmas yg menjadi puskes-mas perawatan di perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar berpenduduk	76	81	86	91	96		Kemenkes

No	SUBSTANSI INTI/KEGIATAN/ PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PAGU	K/L
				2010	2011	2012	2013	2014	Total	
6	Pelayanan Kesehatan Dasar Bagi Masyarakat Miskin (Jamkesmas)*	Meningkatnya pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat miskin di puskesmas	Terselenggaranya pelayanan kesehatan di Puskesmas prioritas dipernatasan dan pulau terluar	101	101	101	101	101		Kemenkes
7	Pembinaan Pelayanan Medik Spesialistik*	Meningkatnya pe-layanan medik spesialistik kepa-da masyarakat	Jumlah RS bergerak yang memberikan pelayanan kesehatan rujukan di DTPK	14	14	10	10	10		Kemenkes
8	Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan*	Meningkatnya perencanaan dan pendayagunaan SDM Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah tenaga kese hatan yang didaya gunakan di DTPK • Jumlah residen senior dan tenaga kesehatan yang diberikan insentif melalui pendayagu naan di DTPK • Jumlah residen senior yang didaya gunakan di DTPK 	1200	1260	1320	1380	1470		Kemenkes
				1900	2050	2210	2370	2560		
				700	790	890	990	1090		
9	Penyediaan guru untuk seluruh jenjang pendidikan	Tersedianya guru yang bermutu dan merata antar prov, kab, dan kota.	Jumlah guru penerima tunjangan khusus	30.000 orang	30.000 orang	30.000 orang	30.000 orang	30.000 orang	300	Kemendiknas
10	Pendidikan dan pelatihan pendidik dan tenaga kependidikan	Meningkatnya pem berdayaan dan pengembangan pendidikan tenaga kependidikan	Persentase guru di daerah terpencil yang mengikuti peningkat-yan kompetensi dan perofesionalisme	10%	20%	30%	40%	50%	*) Pagu termasuk dalam Prioritas 2	Kemendiknas
11	Pendayagunaan pulau-pulau kecil	Terwujudnya 200 pulau kecil yang memiliki infrastruk tur mamadai,	Jumlah pulau kecil yang diidentifikasi dan dipetakan pertamanya termasuk pulau-pulau kecil terluar	20 pulau	55 pulau	60 pulau	50 pulau	20 pulau	578.49	KKP

No	SUBSTANSI INTI/KEGIATAN/ PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PAGU	K/L
				2010	2011	2012	2013	2014	Total	
		ekosistem baik, siap terhadap bencana, dan 25 di antaranya terinvestasi	Jumlah pulau kecil yang memiliki infrastruktur memadai secara terintegrasi, termasuk pulau-pulau kecil terluar	20 pulau	55 pulau	60 pulau	50 pulau	20 pulau		
12	Dukungan pengembangan dan penda-yagunaan teknologi pendukung pemba-ngunan daerah tertinggal, terdepan dan pasca konflik	Kebijakan, penda-yagunaan teknolo-gi pendukung pem bangunan	Jumlah kebijakan	1	1	1	1	1	5,00	KRT
			Jumlah pilot pendukung teknologi untuk pembangunan daerah tertinggal	1	1	1	1	1		
13	Teknologi Efisiensi Pemanfaatan Sumberdaya Air	Termanfaatkannya teknologi efisiensi pemanfaatan sumberdaya air di daerah tertinggal	Rekomendasi dan pilot plant untuk pemanfaatan sumberdaya air	1	1	1	1	1	6,25	BPPT
Substansi Inti 2, KERJASAMA INTERNASIONAL :										
Pembentukan kerjasama dengan negara-negara tetangga dalam rangka pengamanan wilayah dan sumber daya kelautan										
1	Peningkatan operasional dan pemeliharaan kapal pengawas	Meningkatnya wilayah pengelolaan perikanan bebas <i>IUU fishing</i>	Jumlah wilayah pengelolaan perikanan bagian barat	3 WPP	3 WPP	4 WPP	5 WPP	5 WPP	1617.32	KKP
			Jumlah wilayah pengelolaan perikanan bagian timur	6 WPP	6 WPP	6 WPP	6 WPP	6 WPP		
2	Pengembangan Sarana dan Prasarana Pengawasan dan Pemantuan Kapal Perikanan	Terpenuhinya sarana dan prasarana pengawasan dengan rancang bangun dan sistem pemantauan yang terintegrasi dan tepat sasaran	Jumlah pemenuhan sarana pengawasan yang memadai secara terintegrasi, akuntabel dan tepat waktu :						536.85	KKP
			• Kapal Pengawas	0	4	18	18	15		
			• Speedboat	15	32	28	32	30		
			• Stasiun Rabar Satelit	0	0	0	0	0		
			• Transmitter	0	1000	0	0	0		

No	SUBSTANSI INTI/KEGIATAN/ PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PAGU	K/L
				2010	2011	2012	2013	2014	Total	
			<ul style="list-style-type: none"> • Pemenuhan prsarana pengawasan yang memadai secara terintegrasi, akuntabel dan tepat waktu • Kantor dan bangunan pengawas • Dermaga • Pos pengawas 							
				5	6	6	7	6		
				2	6	6	7	6		
				15	10	15	15	15		
3	Pembangunan sarana dan prasarana pertahanan di wilayah perbatasan	Meningkatnya sarana dan prasarana pertahanan di wilayah perbatasan	Jumlah sarana dan prasarana pertahanan di wilayah perbatasan	10%	6%	7%	9%	10%	12.86	Kemenhan
4	Operasi Pemberdayaan Wilayah Pertahanan	Terselenggaranya operasi wilayah pertahanan	Prosentase kualitas dan kuantitas pembinaan wilayah pertahanan nasional	45%	44%	45%	46%	47%	54.68	Kemenhan
Substansi Inti 3, KEUTUHAN WILAYAH:										
Penyelesaian pemetaan wilayah perbatasan RI dengan Malaysia, Papua Nugini, Timor Leste, dan Filipina pada 2010-2014										
1	Pelaksanaan Perundingan Perbatasan RI-Malaysia, Singapura, Timor Leste, Filipina, Vietnam, dan Palau.	Terselenggaranya perundingan perbatasan RI-Malaysia, Singapura, Timor Leste, Filipina, Vietnam, dan Palau	Jumlah pelaksanaan perundingan perbatasan maritim dan darat	12 perundingan	12 perundingan	12 perundingan	12 perundingan	12 perundingan	12,82	Kemenlu
2	Pemetaan Batas wilayah	Tersusunnya kebijakan pemetaan batas wilayah dan meningkatnya cakupan peta batas wilayah	Jumlah NLP Peta batas wilayah negara (joint Mapping) kori-dor perbatasan darat RI-PNG, RI-Malaysia skala 1:50.000	-	12	12	15	5	4.4	BAKOSURTA NAL
			Jumlah NLP pemetaan kecamatan kawasan perbatasan darat RI-PNG, RI-Malaysia, dan RI-RDTL skala 1:50.000 serta skala 1:25.000	72	89	-	-	-	13.1	

No	SUBSTANSI INTI/KEGIATAN/ PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PAGU	K/L
				2010	2011	2012	2013	2014	Total	
			Jumlah pemetaan pulau-pulau terluar	25	20	13	-	-	2.4	
			Jumlah (Border Sign Post) BSP RI-RDTL	-	60	60	60	60	2.6	
			Jumlah Perapatan pilar batas RI-Malaysia	22	22	22	22	22	12.1	
			Jumlah Perapatan pilar batas RI-PNG	-	5	5	5	5	4.9	
			Jumlah Perapatan pilar batas RI-RDTL	60	60	60	60	60	6.1	
			Jumlah dokumen perundingan teknis batas darat	3	3	3	3	3	6.4	
			Jumlah dokumen perundingan teknis batas maritim	3	3	3	4	4	6	
3	Pengelolaan Pertanahan Provinsi	Data hasil inventarisasi Wilayah Pesisir, Pulau-Pulau Kecil, Perbatasan dan Wilayah Tertentu (WP3WT)	Inventarisasi Wilayah Pesisir, Pulau-Pulau Kecil, Perbatasan dan Wilayah Tertentu (WP3WT)	200 SP	187 SP	184 SP	157 SP	157 SP	98,76	BPN
4	Pengelolaan Wilayah Pesisir, Pulau-Pulau Kecil, Perbatasan dan Wilayah Tertentu (WP3WT) (di pusat)	Data hasil inventarisasi Wilayah Pesisir, Pulau-Pulau Kecil, Perbatasan dan Wilayah Tertentu (WP3WT)	Inventarisasi Wilayah Pesisir, Pulau-Pulau Kecil, Perbatasan dan Wilayah Tertentu (WP3WT)	1 Paket	1 Paket	1Paket	1 Paket	1 Paket	29,62	BPN
Substansi Inti 4, DAERAH TERTINGGAL: Pengentasan daerah tertinggal di sedikitnya 50 kabupaten paling lambat 2014										
1	Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT)	Terpenuhinya kebutuhan dasar, aksesibilitas dan pelayanan sosial dasar bagi warga KAT	Tersedianya permukiman dan infrastruktur Pemberian jaminan hidup	2.515 unit 2.515 KK	2.650 unit 2.650 KK	3.150 unit 3.150 KK	3.850 unit 3.850 KK	4.250 unit 4.250 KK	763.6	Kemensos

No	SUBSTANSI INTI/KEGIATAN/ PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PAGU	K/L
				2010	2011	2012	2013	2014	Total	
2	Pengembangan kebijakan, koordinasi dan fasilitasi pusat produksi daerah tertinggal	1. Meningkatnya pengembangan pusat produksi di daerah tertinggal 2. Terfasilitasinya pemulihan ekonomi dan pengurangan kemiskinan, dengan menciptakan dan memberdayakan lingkungan pendukung bagi perbaikan kegiatan usaha dan pembangunan manusia	1. Persentase kabupaten di daerah tertinggal yang memiliki pusat produksi 2. (a). meningkatkan kemampuan dan keberdayaan petani skala kecil dan aparat pemerintah untuk mendukung kegiatan usaha berbasis kelompok di perdesaan, (b). Melaksanakan kegiatan perbaikan usaha pertanian dan usaha lainnya, (c). Meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam perencanaan belanja publik, manajemen pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasi program.	20%	40%	60%	80%	100%	309.60	KPDT
				100%	100%	100%				
3	Pengembangan kebijakan, koordinasi dan fasilitasi Pusat Pertumbuhan Daerah Tertinggal	1. Meningkatnya pengembangan pusat pertumbuhan di Daerah Tertinggal 2. Terfasilitasinya pembiayaan untuk pengembangan ekonomi	1. Persentase kabupaten di daerah tertinggal yang memiliki Pusat Pertumbuhan 2. Persentase kabupaten di daerah tertinggal yang mendapatkan fasilitasi pembiayaan untuk pengembangan ekonomi melalui (a) Berkembangnya sektor usaha swasta berorientasi pasar, (b) meningkatnya kualitas dan nilai tambah produksi pertanian, perikanan, dan perkebunan, (c). Meningkatkan perdagangan internasional, dan (d). Meningkatkan investasi dalam negeri maupun luar negeri	20%	40%	60%	80%	100%	676.59	KPDT
				100%	100%	100%				

No	SUBSTANSI INTI/KEGIATAN/ PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PAGU	K/L
				2010	2011	2012	2013	2014	Total	
4	Pengembangan kebijakan, koordinasi dan fasilitasi usaha mikro kecil menengah dan koperasi daerah tertinggal	Meningkatnya pengembangan usaha mikro kecil menengah dan koperasi di daerah tertinggal	Persentase daerah tertinggal yang mengembangkan usaha mikro kecil menengah dan koperasi di daerah tertinggal	20%	40%	60%	80%	100%	93.00	KPDT
5	Pengembangan kebijakan, koordinasi dan fasilitasi pendanaan dan kemitraan usaha daerah tertinggal	Meningkatnya ketersediaan sumber pendanaan dan pengembangan kemitraan usaha di daerah tertinggal	Persentase kabupaten di daerah tertinggal yang telah memiliki sumber pendanaan dan melaksanakan kemitraan usaha dengan daerah lain.	20%	40%	60%	80%	100%	92.00	KPDT
6	Pengembangan kebijakan, koordinasi dan fasilitasi investasi ekonomi daerah tertinggal	Meningkatnya jumlah dan nilai investasi di daerah tertinggal	Persentase kabupaten di daerah tertinggal yang telah meningkatkan jumlah dan nilai investasi	20%	40%	60%	80%	100%	96.00	KPDT

No	SUBSTANSI INTI/KEGIATAN/ PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PAGU	K/L
				2010	2011	2012	2013	2014	Total	
7	Pengembangan kebijakan, koordinasi dan fasilitasi penguatan kelembagaan pemerintah daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan pasca konflik.	1. Meningkatnya kemampuan sistem, organisasi, dan SDM pemerintahan daerah untuk mewujudkan good governance 2. (i) Meningkatnya kemampuan kelembagaan Pemda dan masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya lokal, (ii) Meningkatnya kegiatan ekonomi, pengembangan sumberdaya manusia, dan infrastruktur lingkungan perdesaan secara terpadu di daerah tertinggal, dan (iii) Meningkatkan mobilitas penduduk dan arus barang antara daerah tertinggal ke pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan pelayanan publik, melalui PNPM Mandiri	1. Persentase kabupaten didaerah tertinggal yang memperoleh fasilitasi penguatan kelembagaan pemerintah daerah dan mengalami peningkatan indeks good governance 2. (i) Persentase jumlah kabupaten tertinggal yang kemampuan kelembagaan pembangunan masyarakat dan pemda meningkat dalam pengelolaan sumberdaya lokal, (ii) Persentase jumlah kawasan pembangunan perdesaan yang terpadu dari aspek ekonomi, sumberdaya manusia, dan infrastruktur lingkungan, dan (iii) Persentase kabupaten didaerah tertinggal yang mengalami peningkatan mobilitas penduduk dan arus barang antara daerah tertinggal ke pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan pelayanan publik	20%	40%	60%	80%	100%	1,227.49	KPDT
				64%	100%	100%	100%	100%		

No	SUBSTANSI INTI/KEGIATAN/ PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PAGU	K/L
				2010	2011	2012	2013	2014	Total	
8	Pengembangan kebijakan, koordinasi dan fasilitasi penguatan kelembagaan sosial masyarakat daerah tertinggal	Meningkatnya kapasitas kelembagaan sosial masyarakat daerah tertinggal	Persentase kabupaten didaerah tertinggal yang memperoleh fasilitasi penguatan kelembagaan sosial masyarakat daerah tertinggal	20%	40%	60%	80%	100%	89.00	KPDT
9	Pengembangan kebijakan, koordinasi dan fasilitasi lembaga kerjasama antar daerah daerah tertinggal	Meningkatnya kerjasama antar lembaga pemerintah di daerah tertinggal	persentase kabupaten daerah tertinggal yang menjalin kerjasama dengan pemerintah daerah lain.	20%	40%	60%	80%	100%	85.00	KPDT
10	Pengembangan kebijakan, koordinasi dan fasilitasi lembaga perekonomian daerah tertinggal	Meningkatnya kapasitas lembaga perekonomian daerah tertinggal	persentase kabupaten didaerah tertinggal yang memperoleh fasilitasi penguatan lembaga perekonomian di daerah tertinggal	20%	40%	60%	80%	100%	77.00	KPDT
11	Pengembangan kebijakan, koordinasi dan fasilitasi kemitraan antar lembaga daerah tertinggal	Meningkatnya kemitraan antar lembaga pemerintahan kabupaten daerah tertinggal	persentase kabupaten didaerah tertinggal yang memperoleh fasilitasi penguatan kemitraan antar lembaga daerah tertinggal	20%	40%	60%	80%	100%	77.00	KPDT
12	Pengembangan kebijakan, koordinasi dan fasilitasi pembangunan infrastruktur kesehatan daerah tertinggal	Meningkatnya koordinasi pembangunan infrastruktur kesehatan daerah tertinggal	Persentase kabupaten didaerah tertinggal yang memperoleh fasilitasi pembangunan infrastruktur kesehatan daerah tertinggal	20%	40%	60%	80%	100%	70.00	KPDT
13	Pengembangan kebijakan, koordinasi dan fasilitasi Kesehatan Dasar, Lanjutan Daerah Tertinggal	Meningkatnya persentase kabupaten didaerah tertinggal yang memiliki kebijakan di bidang Kesehatan Dasar Daerah Tertinggal	Persentase kabupaten didaerah tertinggal yang memiliki kebijakan di bidang Kesehatan Dasar Daerah Tertinggal	20%	40%	60%	80%	100%	62.00	KPDT

No	SUBSTANSI INTI/KEGIATAN/ PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PAGU	K/L
				2010	2011	2012	2013	2014	Total	
14	Pengembangan kebijakan, koordinasi dan fasilitasi pembangunan infrastruktur pendidikan daerah tertinggal	Meningkatnya persentase kabupaten didaerah tertinggal yang memiliki kebijakan di bidang pembangunan infrastruktur pendidikan daerah tertinggal	Persentase kabupaten didaerah tertinggal yang memiliki kebijakan di bidang pembangunan infrastruktur pendidikan daerah tertinggal	20%	40%	60%	80%	100%	48.00	KPDT
15	Pengembangan kebijakan, koordinasi dan fasilitasi Pendidikan Dasar, Menengah Dan Kejuruan di Daerah Tertinggal	Meningkatnya persentase kabupaten didaerah tertinggal yang memiliki kebijakan Pendidikan Dasar, Menengah Dan Kejuruan Daerah Tertinggal	Persentase kabupaten didaerah tertinggal yang memiliki kebijakan Pendidikan Dasar, Menengah Dan Kejuruan Daerah Tertinggal	20%	40%	60%	80%	100%	48.00	KPDT
16	Pengembangan kebijakan, koordinasi dan fasilitasi Pendidikan Luar Sekolah Daerah Tertinggal	Meningkatnya persentase kabupaten didaerah tertinggal yang memiliki kebijakan di bidang Pendidikan Luar Sekolah Daerah Tertinggal	Persentase kabupaten didaerah tertinggal yang memiliki kebijakan di bidang Pendidikan Luar Sekolah Daerah Tertinggal	20%	40%	60%	80%	100%	87.00	KPDT
17	Pengembangan kebijakan, koordinasi dan fasilitasi pembangunan infrastruktur ekonomi daerah tertinggal	Meningkatnya persentase kabupaten didaerah tertinggal yang memiliki kebijakan pembangunan infrastruktur ekonomi daerah tertinggal	Persentase kabupaten didaerah tertinggal yang memiliki kebijakan pembangunan infrastruktur ekonomi daerah tertinggal	20%	40%	60%	80%	100%	170.00	KPDT

No	SUBSTANSI INTI/KEGIATAN/ PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PAGU	K/L
				2010	2011	2012	2013	2014	Total	
18	Pengembangan kebijakan, koordinasi dan fasilitasi pembangunan infrastruktur energi daerah tertinggal	1. Meningkatnya persentase kabupaten didaerah tertinggal yang memiliki kebijakan pembangunan infrastruktur energi daerah tertinggal 2. Meningkatnya Pemanfaatan Energi Matahari untuk Pengembangan Infrastruktur Dasar di Wilayah Perdesaan Tertinggal Terpenting	1. Persentase kabupaten didaerah tertinggal yang memiliki kebijakan pembangunan infrastruktur energi daerah tertinggal 2. Persentase kabupaten didaerah tertinggal yang memiliki database permintaan kelistrikan dengan menggunakan teknologi GIS dan memanfaatkan energi matahari untuk pengembangan infrastruktur serta peningkatan kemampuan masyarakat yang dapat melakukan pemetaan Wilayah Rentan Perubahan Iklim dan Kegiatan Adaptasi Untuk Mengantisipasi Perubahan Iklim	20%	40%	60%	80%	100%	220.49	KPDT
19	Pengembangan kebijakan, koordinasi dan fasilitasi pembangunan infrastruktur telekomunikasi daerah tertinggal	Meningkatnya persentase kabupaten didaerah tertinggal yang memiliki kebijakan pembangunan infrastruktur telekomunikasi daerah tertinggal	Persentase kabupaten didaerah tertinggal yang memiliki kebijakan pembangunan infrastruktur telekomunikasi daerah tertinggal	20%	40%	60%	80%	100%	60.00	KPDT
20	Pengembangan kebijakan, koordinasi dan fasilitasi Pembangunan Infrastruktur Transportasi Daerah Tertinggal	Meningkatnya persentase kabupaten didaerah tertinggal yang memiliki kebijakan di bidang pembangunan infrastruktur transportasi daerah tertinggal	Persentase kabupaten didaerah tertinggal yang memiliki kebijakan di bidang pembangunan infrastruktur transportasi daerah tertinggal	20%	40%	60%	80%	100%	232.00	KPDT

No	SUBSTANSI INTI/KEGIATAN/ PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PAGU	K/L
				2010	2011	2012	2013	2014	Total	
21	Pengelolaan dan Penyelenggaraan kegiatan di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Laut	Tersedianya kapal penumpang dan perintis 34 unit	Unit kapal	2	5	10	8	9	2.793,7	Kemenhub
		Tersedianya subsidi perintis angkutan laut 76 trayek di 17 provinsi	Trayek	60	64	68	72	76	2.135,0	
22	Pembangunan dan Pengelolaan Prasarana dan Fasilitas Lalu Lintas Angkutan Jalan	Pelayanan Keperintisan Angkutan Jalan (577 bus perintis dan 907 lintas perintis)	Lintas bus perintis	175	177	180	185	190	284,89	Kemenhub
			Unit bus perintis	37	100	120	150	170	200,25	
23	Pembangunan Sarana & Prasarana Transportasi SDP dan pengelolaan prasarana lalulintas SDP	Terbangunnya 20 Sarana Keperintisan	Jumlah Sarana	4	3	4	5	4	1.264,8	Kemenhub
		Tersedianya 510 pelayanan Keperintisan	Jumlah Lintas	85	95	100	110	120	775,9	
24	Pelayanan Angkutan Udara Perintis	Tersedianya 580 rute perintis	Jumlah rute perintis yang terlayani	118	118	114	115	115	892,42	Kemenhub

PRIORITAS 11	KEBUDAYAAN, KREATIVITAS, DAN INOVASI TEKNOLOGI
TEMA PRIORITAS	<i>Pengembangan dan perlindungan kebhinekaan budaya, karya seni, dan ilmu serta apresiasinya, untuk memperkaya khazanah artistik dan intelektual bagi tumbuh-mapannya jati diri dan kemampuan adaptif kompetitif bangsa yang disertai pengembangan inovasi, ilmu pengetahuan, dan teknologi yang dilandasi oleh keunggulan Indonesia sebagai negara maritim dan kepulauan</i>
PENANGGUNGJAWAB	Menteri Kebudayaan dan Pariwisata
BEKERJASAMA DENGAN	Menteri Negara Riset dan Teknologi

No.	SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PAGU (Rp Miliar) Total	K/L
				2010	2011	2012	2013	2014		
1. PERAWATAN:										
Penetapan dan pembentukan pengelolaan terpadu untuk pengelolaan Cagar Budaya, revitalisasi museum dan perpustakaan di seluruh Indonesia sebelum Oktober 2011										
1	Pengembangan Pengelolaan Peninggalan Kepurbakalaan	Meningkatnya kualitas perlindungan, pemeliharaan, pengembangan, dan pemanfaatan BCB/ Situs dan Kawasan kepurbakalaan secara terpadu	Penetapan dan pembentukan pengelolaan terpadu cagar budaya (Kawasan Warisan Budaya Dunia yang dimulai dengan Candi Borobudur, Situs Manusia Purba Sangiran, dan Candi Prambanan)	1	3	-	-	-	6,0	Kemenbudpar
2.	Pengembangan Pengelolaan Permuseuman	Meningkatnya kualitas pengelolaan dan pelayanan museum, termasuk museum daerah	Jumlah Museum yang direvitalisasi	4	30	-	-	-	104,5	Kemenbudpar
3	Layanan Jasa Perpustakaan dan Informasi	Meningkatnya kegiatan layanan jasa per pustakaan dan infor masi yang didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai	Jumlah perpustakaan provinsi yang memiliki perangkat perpustakaan digital (<i>e-library</i>)	33	33	-	-	-	60,0	Perpusnas
4	Pengembangan Perpustakaan dan Pengkajian	Meningkatnya upaya pengembangan perpustakaan dan budaya gemar membaca	Jumlah perpustakaan keliling	88	33	-	-	-	46,5	Perpusnas

No.	SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PAGU (Rp Miliar)	K/L
				2010	2011	2012	2013	2014	Total	
	Minat Baca		Jumlah perpustakaan umum; provinsi, kabupaten/kota dan desa/kelurahan yang dikembangkan a. Provinsi b. Kab/kota c. Desa/kelurahan	2.283	2.333					
2. SARANA: Penyediaan sarana yang memadai bagi pengembangan, pendalaman dan pagelaran seni budaya di kota besar dan ibukota kabupaten selambat-lambatnya Oktober 2012										
1	Pelestarian dan Pengembangan Kesenian	Meningkatnya apresiasi, kreativitas dan produktivitas para pelaku seni.	Jumlah fasilitasi sarana bagi pengembangan, pendalaman dan pagelaran seni budaya. - Propinsi - Kabupaten/Kota	- -	14 238	14 238	- -	- -	53,2	Kemenbudpar
2	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Nilai Budaya, Seni dan Film	Meningkatnya manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya dalam rangka pengembangan nilai budaya, seni dan perfilman	Jumlah fasilitasi sarana pengembangan, pendalaman, dan pagelaran seni budaya - Propinsi - Kabupaten/Kota	5 20			- -	- -	3,0	Kemenbudpar
3. PENCIPTAAN: Pengembangan kapasitas nasional untuk pelaksanaan Penelitian, Penciptaan dan Inovasi dan memudahkan akses dan penggunaannya oleh masyarakat luas										
1	Penelitian dan Pengembangan Bidang Arkeologi	Meningkatnya litbang bidang arkeologi	Jumlah litbang di bidang arkeologi	144	147	148	148	148	226,1	Kemenbudpar
2	Penelitian dan Pengembangan Bidang Kebudayaan	Meningkatnya litbang kebudayaan dalam mendukung kebijakan pembangunan kebudayaan	Jumlah penelitian dan pengembangan bidang kebudayaan	13	13	13	13	13	36,0	Kemenbudpar
3	Fasilitasi proses perolehan hak paten dan kepemilikan HKI produk teknologi dan produk kreatif	Kebijakan untuk fasilitasi proses perolehan hak paten dan kepemilikan HKI produk teknologi dan produk kreatif	Jumlah kebijakan	1	1	1	1	1	10,00	KRT

No.	SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PAGU (Rp Miliar)	K/L
				2010	2011	2012	2013	2014	Total	
4	Pelaksanaan Insentif Perolehan Paten dan Kepemilikan HKI	Terlaksananya insentif perolehan paten dan kepemilikan HKI	Jumlah usulan paten dan kepemilikan HKI yang difasilitasi	10	10	10	10	10		
5	Peningkatan Kapasitas SDM Iptek	Meningkatnya kapasitas SDM iptek	Jumlah karyawan	S2 = 50, S3 = 10	S2 = 50, S3 = 20	S2 = 50, S3 = 20	S2 = 50, S3 = 25	S2 = 50, S3 = 25	250,00	KRT
6	Pengembangan dan perlindungan kekayaan budaya	Pengembangan dan perlindungan bahasa masyarakat lokal	Paket	1	1	1	1	1	13,10	LIPI
7	Pengembangan Pranata Inovasi	Drafting paten dan pendaftaran HKI atas produk inovasi teknologi	Pendaftaran HKI	20	21	22	24	27	8,20	LIPI
		Kapitalisasi dan pemanfaatan paten serta invensi LIPI	Paket teknologi/HKI	3	3	4	4	4	8,70	LIPI
8	Pengkajian dan Penerapan Inkubasi Teknologi	Termanfaatkannya in kubasi teknologi utk sinergi antara lembaga litbangyasa, industri dan pemerintah	Paket rekomendasi, advokasi, sruvei dan konsultasi mengenai inkubasi	3	3	3	3	3	65,40	BPPT
9	Pengkajian dan Penerapan Audit Teknologi	Termanfaatkannya Audit Teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas litbang	Paket rekomedasi, advokasi, sruvei dan konsultasi mengenai audit teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas litbang	3	3	3	3	3	26,0	BPPT
4. KEBIJAKAN :										
Peningkatan perhatian dan kesertaan Pemerintah dalam program-program seni budaya yang diinisiasi oleh masyarakat dan mendorong berkembangnya apresiasi terhadap kemajemukan budaya										
1	Pelestarian dan Pengembangan Kesenian	Meningkatnya apresiasi, kreativitas, dan produktivitas para pelaku seni	Jumlah fasilitasi pertunjukan, pameran, festival, lomba, dan pawai	20	20	20	20	20	91,0	Kemenbudpar
			Jumlah reaktualisasi kesenian yang hampir punah	2	2	2	2	2		
			Jumlah naskah inventarisasi karya seni budaya	25	25	25	25	25		
2	Pengembangan Perfilman	Meningkatnya kualitas dan kuantitas produksi	Jumlah Fasilitasi Festival Film dalam dan luar negeri	11	11	11	11	11	81,0	Kemenbudpar

No.	SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PAGU (Rp Miliar)	K/L
				2010	2011	2012	2013	2014	Total	
	Nasional	film nasional	Jumlah fasilitasi organisasi dan komunitas perfilman	18	18	18	18	18		
3	Peningkatan Sensor Film	Meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan lembaga sensor film	Jumlah film/video/ iklan lulus sensor	40.000	42.000	44.000	45.000	50.000	103,8	Kemenbudpar
5. INOVASI TEKNOLOGI :										
Peningkatan keunggulan komparatif menjadi keunggulan kompetitif yang mencakup pengelolaan sumber daya maritim menuju ketahanan energi, pangan, dan antisipasi perubahan iklim; dan pengembangan penguasaan teknologi dan kreativitas pemuda										
1	Peningkatan Kapasitas Pemuda	Meningkatnya kapasitas pemuda kader di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, serta iman dan taqwa	Jumlah pemuda kader yang difasilitasi dalam peningkatan kapasitas di bidang iptek dan imtaq	3.180	3.180	3.180	3.180	3.180	41,50	Kemenpora
2	Pengembangan Kreativitas dan Kualitas Pemuda	Meningkatnya kreativitas pemuda kader di bidang seni, budaya, dan industri kreatif	Jumlah pemuda kader yang difasilitasi dalam peningkatan kapasitas di bidang seni, budaya, dan industri kreatif	3.180	3.180	3.180	3.180	3.180	34,40	Kemenpora
3	Peningkatan kemampuan inovasi dan kreativitas pemuda	Kebijakan peningkatan kemampuan inovasi dan kreativitas pemuda	Jumlah kebijakan	1	1	1	1	1	15,00	KRT
			Jumlah <i>pilot</i> peningkatan inovasi dan kreativitas pemuda	4	4	4	4	4		
4	Pelaksanaan Insentif riset dasar dan terapan	Terlaksananya insentif riset dasar dan terapan	Jumlah paket riset dasar	44	40	35	35	35	150,00	KRT
			Jumlah paket riset terapan	78	70	65	60	60		
5	Peningkatan litbang iptek unggulan di bidang kesehatan, obat-obatan dan instrumentasi medis	Meningkatnya litbang iptek unggulan di bidang kesehatan, obat-obatan dan instrumentasi medis	Jumlah paket penelitian	5	5	5	5	5	100,00	KRT
6	Pelaksanaan insentif difusi iptek	Terlaksananya insentif difusi iptek	Jumlah paket	92	85	80	75	75	125,00	KRT
7	Pelaksanaan insentif peningkatan kapasitas iptek sistem produksi	Terlaksananya insentif peningkatan kapasitas iptek sistem produksi	Jumlah paket insentif	130	120	115	110	100	200,00	KRT

No.	SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PAGU (Rp Miliar)	K/L
				2010	2011	2012	2013	2014	Total	
8	Pengkajian dan Penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Terbangun dan terma nfaatkannya prototipe Perangkat PC USG <i>Multi Chanel</i> , Perangkat Lunak <i>Free-Open Source Software</i> dan Komputasi serta Sistem pengenalan wicara pada Perisalah	Jumlah paket prototype, advokasi, dan rekomendasi	3	3	3	3	3	30,00	BPPT

PRIORITAS LAINNYA	BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT
PENANGGUNGJAWAB	Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat

No.	SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					PAGU INDIKATIF (Rp Miliar)	K/L
				2010	2011	2012	2013	2014	Total	
Pelaksanaan ibadah haji yang tertib dan lancar paling lambat pada 2010										
1.	Pelayanan Haji dan Umrah	Terlaksananya Pelayanan Ibadah Haji dan Umrah serta Pengawasan Haji	Pelaksanaan Ibadah Haji dan Umrah serta Pengawasan Haji yang tertib dan lancar (jemaah)	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000	775,40	Kemenag
2.	Pelayanan Kesehatan Ibadah Haji	Meningkatnya pelayanan kesehatan jemaah haji	Pelayanan kesehatan kepada jemaah haji						943,5	Kemenkes
Peningkatan kerukunan umat beragama melalui pembentukan dan peningkatan efektivitas Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)										
1.	Pembinaan kerukunan hidup umat beragama (FKUB)	Meningkatnya dan terpeliharanya kondisi dan suasana yang aman dan damai dikalangan umat beragama	1. Pembangunan Sekretariat Bersama FKUB Kab/Kota (unit) 2. Operasional FKUB (unit) - Tk Provinsi - Kab/Kota 3. Pemulihan Paska Konflik (Kegiatan)	15 33 150 1	15 33 150 1	20 33 300 1	20 33 440 1	30 33 440 1	33,50 5,00 33,00 37,64	Kemenag

No.	SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					PAGU INDIKATIF (Rp Miliar)	K/L
				2010	2011	2012	2013	2014		
				<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan jumlah wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara sebesar 20% secara bertahap dalam 5 tahun • Promosi 10 tujuan pariwisata Indonesia melalui saluran pemasaran dan pengiklanan yang kreatif dan efektif • Perbaikan dan peningkatan kualitas jaringan prasarana dan sarana pendukung pariwisata • Peningkatan kapasitas pemerintah dan pemangku kepentingan pariwisata lokal untuk mencapai tingkat mutu pelayanan dan <i>hospitality management</i> yang kompetitif di kawasan Asia 						
1.	Pengembangan Daya Tarik Pariwisata	Meningkatnya kualitas dan kuantitas penataan daya tarik wisata	Jumlah daya tarik wisata alam, bahari dan budaya	7	29	29	29	29	101,3	Kemenbudpar
2.	Peningkatan PNPM Mandiri bidang Pariwisata	Meningkatnya jumlah desa wisata	Jumlah desa wisata	200	450	550	450	350	406,0	Kemenbudpar
3.	Pengembangan Usaha, Industri dan Investasi Pariwisata	Berkembangnya usaha, industri dan investasi pariwisata	Jumlah profil investasi pariwisata	5	7	7	7	7	73,0	Kemenbudpar
4.	Pengembangan Standardisasi Pariwisata	Terlaksananya penyusunan dan pemutakhiran standad pariwisata serta penerapan standard dan kompetensi pariwisata	1. Jumlah standard kompetensi 2. Jumlah standard usaha 3. Jumlah tenaga kerja yang disertifikasi (ribu orang)	8 6 10	10 6 10	10 8 15	6 8 9	4 4 6	140,0	Kemenbudpar
5.	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Pengembangan Destinasi Pariwisata	Terselenggaranya kegiatan perencanaan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan, penyusunan kebijakan, peningkatan kualitas SDM aparatur, dan dukungan teknis dalam meningkatkan kapasitas pengelolaan destinasi pariwisata	1. Jumlah Organisasi Pengelolaan Destinasi (<i>Destination Management Organization/DMO</i>) (buah) 2. Jumlah dukungan fasilitas pariwisata (daya tarik)	2 7	5 29	10 29	12 29	15 29	596,2	Kemenbudpar

No.	SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					PAGU INDIKATIF (Rp Miliar)	K/L
				2010	2011	2012	2013	2014	Total	
6.	Peningkatan Promosi Pariwisata Luar Negeri	Meningkatnya partisipasi pariwisata Indonesia pada bursa, misi penjualan (<i>sales mission</i>) dan festival di tingkat internasional	1. Jumlah partisipasi pada bursa pariwisata internasional, pelaksanaan misi penjualan (<i>sales mission</i>), dan pendukung penyelenggaraan festival (<i>event</i>) 2. Jumlah perwakilan promosi pariwisata Indonesia (<i>Indonesia Tourism Promotion Representative Officers</i>) di luar negeri (kota)	72 12	74 12	74 12	77 14	64 15	544,6	Kemenbudpar
7.	Peningkatan Promosi Pariwisata Dalam Negeri	Meningkatnya jumlah <i>event</i> pariwisata dalam negeri	Jumlah penyelenggaraan promosi langsung (<i>direct promotion</i>), dan penyelenggaraan <i>event</i> pariwisata berskala nasional dan internasional.	43	43	44	45	45	225,6	Kemenbudpar
8.	Pengembangan Informasi Pasar Pariwisata	Meningkatnya pemanfaatan informasi pasar pariwisata	1. Jumlah penyebaran informasi fokus pasar pariwisata Indonesia (naskah) 2. Jumlah permintaan pasar untuk berkunjung ke Indonesia (transaksi)	640 8.000	640 8.000	640 8.000	640 9.600	640 10.400	211,0	Kemenbudpar
9.	Peningkatan Publikasi Pariwisata	Meningkatnya kelengkapan informasi tujuan pariwisata Indonesia	1. Jumlah destinasi yang memiliki data dan informasi yang lengkap (daerah) 2. Jumlah bahan promosi cetak, promosi elektronik, publikasi media cetak, media elektronik dan media luar ruang (ribu)	10 1.150	10 1.150	10 1.146	10 1.135	10 1.125	724,7	Kemenbudpar

No.	SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					PAGU INDIKATIF (Rp Miliar) Total	K/L
				2010	2011	2012	2013	2014		
			buah) 3. Jumlah bahan promosi cetak dan promosi elektronik yang terdistribusikan (ribu eksemplar)	709	709	709	708	709		
10.	Peningkatan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi, dan Pameran (<i>Meeting, Incentive Travel, Conference, and Exhibition</i> /MICE)	Meningkatnya penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi, dan Pameran (<i>Meeting, Incentive Travel, Conference, and Exhibition</i> /MICE) nasional dan internasional di Indonesia	Jumlah daerah yang dikembangkan menjadi tujuan wisata MICE (daerah)	5	5	5	8	9	229,7	Kemenbudpar
11.	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Pemasaran	Terselenggaranya kegiatan koordinasi perencanaan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan, penyusunan kebijakan, peningkatan kualitas SDM aparatur, dan pendukung teknis peningkatan pemasaran pariwisata	Jumlah <i>event</i> pengembangan kebijakan pemasaran dan promosi pariwisata oleh masyarakat dan daerah	102	96	95	92	91	501,4	Kemenbudpar
12.	Pengembangan SDM Kebudayaan dan Pariwisata	Meningkatnya kapasitas sumber daya manusia aparatur/industri dan masyarakat bidang kebudayaan dan pariwisata	Jumlah sumber daya yang dilatih di bidang kebudayaan dan pariwisata (orang)	1.150	1.150	1.175	1.190	1.200	34,0	Kemenbudpar
13.	Pengembangan Pendidikan Tinggi Bidang Pariwisata	Meningkatnya profesionalisme dan daya saing SDM bidang pariwisata di lembaga	Jumlah program studi	34	36	38	40	42	1.088,5	Kemenbudpar

No.	SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					PAGU INDIKATIF (Rp Miliar)	K/L
				2010	2011	2012	2013	2014		
						pendidikan tinggi pariwisata				
<ul style="list-style-type: none"> Perumusan kebijakan dan pedoman bagi penerapan pengarusutamaan (<i>mainstreaming</i>) Gender (PUG) oleh Kementerian dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian lainnya, termasuk perlindungan bagi perempuan dan anak terhadap berbagai tindak kekerasan 										
1.	Penyusunan dan harmonisasi kebijakan bidang pendidikan yang responsif gender	Meningkatnya jumlah kebijakan pelaksanaan PUG bidang pendidikan	1. Jumlah kebijakan pelaksanaan PUG dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan 2. Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi dalam penerapan ARG di bidang pendidikan (K/L dan prov)	2 1 5	1 1 2	- 1 2	- 1 5	- 1 5	11,1	KPP&PA
2.	Penyusunan dan harmonisasi kebijakan bidang kesehatan yang responsif gender	Meningkatnya jumlah kebijakan pelaksanaan PUG bidang kesehatan	1. Jumlah kebijakan pelaksanaan PUG di bidang kesehatan 2. Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi dalam penerapan ARG di bidang kesehatan (K/L dan prov)	3 1 5	1 1 5	- 1 5	- 1 5	- 1 5	12,5	KPP&PA
3.	Penyusunan dan harmonisasi kebijakan partisipasi perempuan di bidang politik dan pengambilan keputusan	Meningkatnya jumlah kebijakan partisipasi perempuan di bidang politik dan pengambilan keputusan	1. Jumlah kebijakan pelaksanaan PUG di bidang politik dan pengambilan keputusan 2. Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi dalam penerapan ARG di bidang politik	2 3 7	1 3 7	1 3 6	1 3 6	- 3 7	18,5	KPP&PA

No.	SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					PAGU INDIKATIF (Rp Miliar)	K/L
				2010	2011	2012	2013	2014	Total	
			dan pengambilan keputusan (K/L dan prov)							
4.	Penyusunan dan harmonisasi kebijakan bidang ketenagakerjaan yang responsif gender	Meningkatnya jumlah kebijakan pelaksanaan PUG bidang ketenagakerjaan	1. Jumlah kebijakan pelaksanaan PUG di bidang ketenagakerjaan 2. Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi dalam penerapan ARG di bidang ketenagakerjaan (K/L dan prov)	1 1 5	1 1 5	1 1 5	- 1 5	- 1 5	14,6	KPP&PA
5.	Penyusunan dan harmonisasi kebijakan perlindungan perempuan dari tindak kekerasan	Meningkatnya jumlah kebijakan perlindungan perempuan dari tindak kekerasan	1. Jumlah kebijakan perlindungan perempuan dari tindak kekerasan 2. Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi dalam penerapan kebijakan perlindungan perempuan dari tindak kekerasan (K/L dan prov)	5 3 6	4 3 14	- 3 33	- 6 33	- 3 33	50,1	KPP&PA
6.	Penyusunan dan harmonisasi kebijakan penyusunan data gender	Meningkatnya jumlah kebijakan penerapan sistem data gender	1. Jumlah kebijakan penerapan sistem data gender 2. Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi dalam penerapan kebijakan penerapan sistem data terpilah gender (K/L dan prov)	2 1 -	2 4 8	- 4 8	- 4 8	- 4 9	62,4	KPP&PA
7.	Penyusunan dan harmonisasi kebijakan perlindungan tenaga kerja	Meningkatnya jumlah kebijakan perlindungan tenaga kerja perempuan	1. Jumlah kebijakan perlindungan tenaga kerja perempuan	1	-	-	-	3	13,0	KPP&PA

No.	SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					PAGU INDIKATIF (Rp Miliar)	K/L
				2010	2011	2012	2013	2014	Total	
	perempuan		2. Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi dalam penerapan kebijakan perlindungan tenaga kerja perempuan (K/L dan prov)	1 5	1 5	1 5	1 5	1 3		
8.	Penyusunan dan harmonisasi kebijakan perlindungan korban perdagangan orang	Meningkatnya jumlah kebijakan perlindungan korban tindak pidana perdagangan orang	1. Jumlah kebijakan perlindungan korban tindak pidana perdagangan orang 2. Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi dalam penerapan kebijakan perlindungan korban tindak pidana perdagangan orang (K/L dan prov)	2 1 5	1 10 15	- 10 15	- 10 15	- 10 15	33,8	KPP&PA
9.	Penyusunan dan harmonisasi kebijakan penghapusan kekerasan pada anak	Meningkatnya jumlah kebijakan penghapusan kekerasan pada anak	1. Jumlah kebijakan penghapusan kekerasan pada anak 2. Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi tentang penghapusan kekerasan pada anak (K/L dan prov)	1 1 5	1 1 5	1 1 6	- 1 5	1 2 5	11,8	KPP&PA
• Pencapaian posisi papan atas pada South East Asia (SEA) Games pada tahun 2011, peningkatan perolehan medali di Asian Games tahun 2010 dan Olimpiade tahun 2012										
1.	Peningkatan prasarana dan sarana keolahragaan	Meningkatnya penyediaan prasarana dan sarana keolahragaan yang memenuhi standar kelayakan	1. Jumlah fasilitasi penyediaan prasarana olahraga. 2. Jumlah penyediaan sarana olahraga	- -	4 36	- -	- -	- -	100,00	Kemenpora

No.	SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					PAGU INDIKATIF (Rp Miliar)	K/L
				2010	2011	2012	2013	2014	Total	
2.	Pembinaan Olahraga Prestasi	Meningkatnya pembinaan olahraga prestasi	1. Jumlah olahragawan andalan nasional 2. Jumlah fasilitasi penyelenggaraan SEA Games dan Para Games pada tahun 2011 3. Jumlah fasilitasi keikutsertaan pada Asian Games, SEA Games, Olympic Games, Asian Para Games, Para Games, dan Paralympic Games	520 - 2	520 2 2	520 - 2	- - -	- - -	1.216,05	Kemenpora
<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan character building melalui gerakan, revitalisasi dan konsolidasi gerakan kepemudaan • Revitalisasi Gerakan Pramuka 										
1.	Peningkatan Wawasan Pemuda	Meningkatnya wawasan pemuda kader di bidang kebangsaan, perdamaian, dan lingkungan hidup	Jumlah pemuda yang difasilitasi dalam peningkatan wawasan kebangsaan, perdamaian, dan lingkungan hidup,	5.500	6.000	6.500	7.000	7.500	40,35	Kemenpora
2.	Pemberdayaan Organisasi Kepemudaan	Meningkatnya kapasitas pengelolaan organisasi kepemudaan	1. Jumlah pengelola organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pelatihan kepemimpinan, manajemen, dan perencanaan program, 2. Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam memenuhi kualifikasi berdasarkan standar organisasi kepemudaan	6.000 98	7.000 100	8.000 110	9.000 120	10.000 140	30,40	Kemenpora

No.	SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					PAGU INDIKATIF (Rp Miliar)	K/L
				2010	2011	2012	2013	2014	Total	
3.	Pengembangan Kepanduan	Terlaksananya pendidikan, pengembangan, dan pemasyarakatan kepanduan	1. Jumlah pemuda yang difasilitasi dalam pendidikan kepemudaan, 2. Jumlah pemuda yang difasilitasi dalam pendidikan kepanduan	250 3.100	450 4.850	500 5.100	500 5.350	500 5.600	412,04	Kemenpora
4.	Pengembangan Kepemimpinan Pemuda	Meningkatnya kapasitas dan potensi kepemimpinan pemuda	Jumlah pemuda kader kepemimpinan	4.500	6.000	7.500	9.000	11.500	44,41	Kemenpora
5.	Pengembangan Kewirausahaan Pemuda	Meningkatnya kapasitas dan potensi kewirausahaan pemuda	Jumlah pemuda yang difasilitasi sebagai kader kewirausahaan	3.175	3.200	3.300	3.400	3.500	46,01	Kemenpora

PRIORITAS LAINNYA	BIDANG PEREKONOMIAN
PENANGGUNGJAWAB	Menteri Koordinator Bidang Perekonomian

No.	SUBSTANSI INTI / KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PAGU (Rp. MILYAR)	K/L
				2010	2011	2012	2013	2014	Total	
Pelaksanaan pengembangan industri sesuai dengan Peraturan Presiden No.28/2008 tentang Kebijakan Industri Nasional										
1	Pengembangan kluster industri berbasis pertanian, oleochemical	Fasilitasi Terbentuknya Kawasan Industri Berbasis CPO di 3 provinsi	Provinsi Sumut, Kaltim, dan Riau	20%	40%	60%	80%	100%	30.4	Kemenperin
			Jumlah Perusahaan	40	100	100	100	100		
			Pilot project industri turunan kelapasawit	1	1					
Peningkatan peran dan kemampuan Republik Indonesia dalam diplomasi perdagangan internasional										
1	Peningkatan Peran Diplomasi Ekonomi dalam Forum Multilateral	Terlaksananya partisipasi aktif dalam berbagai siding di forum multilateral	Jumlah posisi Pemri yang disampaikan dalam siding internasional terkait isu perdagangan, perindustrian, investasi, HAKI, ekonomi dan keuangan	25 posisi	27 posisi	31 posisi	31 posisi	33 posisi	154,2	Kemenlu
			Jumlah koordinasi teknis/ penyelenggaraan pertemuan/ partisipasi dalam siding terkait isu perdagangan, perindustrian, investasi, HAKI, ekonomi dan keuangan	114 kali	115 kali	116 kali	117 kali	116 kali		

No.	SUBSTANSI INTI / KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PAGU (Rp. MILYAR)	K/L
				2010	2011	2012	2013	2014	Total	
2	Pelaksanaan Kerja Sama Bilateral dalam promosi/kerjasama ekonomi, perdagangan, dan investasi	Terfasilitasinya promosi/ kerjasama ekonomi, perdagangan, dan investasi	% fasilitasi untuk sidang/pameran/forum bisnis (<i>Trade, Tourism and Investment</i>) di kawasan Asia Timur dan Pasifik, Sub Sahara Afrika, Eropa Tengah dan Timur	100%	100%	100%	100%	100%	11,9	Kemenlu
3	Perluasan Pasar Non Tradisional	Terfasilitasinya penyelenggaraan kerjasama bilateral di kawasan Asia Timur, dan Sub Sahara Afrika	% fasilitasi penyelenggaraan kerjasama di bidang ekonomi dengan negara-negara di kawasan Asia Timur dan Sub Sahara Afrika	100%	100%	100%	100%	100%	9,3	Kemenlu
4	Peningkatan Peran Dan Kemampuan Diplomasi Perdagangan Internasional	Meningkatnya peran dan kemampuan Indonesia di bidang diplomasi perdagangan internasional guna pembukaan, peningkatan dan pengamanan akses pasar	Jumlah partisipasi dalam perundingan perdagangan internasional	40	40	45	50	55	179,9	Kemenda g
			Jumlah posisi runding yang disusun	40	40	45	50	55		
			Jumlah penyelenggaraan sidang internasional di Dalam Negeri	8	8	8	8	8		
			Jumlah hasilperundingan Perdagangan Internasional (MRA, MOU, Agreement, Agreed Minutes, Declaration, Chair Report)	34	34	34	34	34		
			Jumlah forum konsultasi tek-nis kesepakatan perundingan internasional	6	8	8	8	8		
Peningkatan pelayanan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) selama proses penyiapan, pemberangkatan, dan kepulangan										
1	Regulasi dan Sertifikasi Sistem Elektronik Jasa Aplikasi dan Konten	Tersedianya sistem informasi layanan TKI antar instansi/lembaga	a. Adanya sistem informasi layanan TKI	Electronic Form; Document	Contact mgmt; Change	Case mgmt; Incident & Problem	Operasional dan pemeliharaan	Operasional dan pemeliharaan	10,0	Kemenkom info

No.	SUBSTANSI INTI / KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PAGU (Rp. MILYAR)	K/L	
				2010	2011	2012	2013	2014	Total		
			b. Jumlah instansi/lembaga yang terhubung dengan sistem	mgmt; Job Order mgmt; Recruitment mgmt; Selection mgmt; Security; Interoperability; Placement mgmt; Campaign mgmt; Operasional Kemenakertrans, BNP2TKI, Kemendagri, Dephukham, Kemenlu, Depdiknas, Kemenkominfo, Kemenkes, Daerah	mgmt; Service Desk mgmt; Payment System mgmt; Performance & Capacity mgmt; Campaign mgmt; Service Order mgmt; Skill & Competency mgmt; Sertifikasi ISO 9001: Sistem mgmt Mutu Kemenakertrans, BNP2TKI, Kemendagri, Dephukham, Kemenlu, Depdiknas, Kemenkominfo, Kemenkes, Daerah	mgmt; Business Continuity; Service Level mgmt; Serifikasi ISO 20000 : IT Service mgmt Kemenakertrans, BNP2TKI, Kemendagri, Dephukham, Kemenlu, Depdiknas, Kemenkominfo, Kemenkes, Daerah, Kantong TKI, POLRI, Menko				-	

No.	SUBSTANSI INTI / KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PAGU (Rp. MILYAR)	K/L
				2010	2011	2012	2013	2014	Total	
			c. Adanya Infrastruktur SIM TKI	kantong TKI	Daerah Kantong TKI, POLRI, Menko Perekonomian, Menko Kesra	Menko Perekonomian, Menko Kesra	Perekonomian, Menko Kesra	Perekonomian, Menko Kesra	8,0	
			d. Adanya Business Process Reengineering	a. Server b. Network c. Koneksi Internet	a. Server b. Network c. Koneksi Internet	a. Server b. Network c. Koneksi Internet	Koneksi Internet	Koneksi Internet	3,0	
			e. Adanya regulasi berjalanya SIM TKI	Business Process Reengineering Regulasi Pendukung	Business Process Reengineering Regulasi Pendukung	Business Process Reengineering Regulasi Pendukung	-	-	3,0	
2	Pembinaan Administrasi Pendaftaran Penduduk	Tersedianya pelayanan dokumen kependudukan yang cepat, mudah, murah dan aman bagi TKI	a. Jumlah SKPLN (Surat Keterangan Pindah LN) yang diterbitkan sesuai dengan identitas calon TKI b. Jumlah TKI yang terdaftar di Perwakilan RI/NIK calon TKI	500 ribu TKI 500 ribu TKI	1 juta TKI 1 juta TKI	1 juta TKI 1 juta TKI	1 juta TKI 1 juta TKI	1 juta TKI 1 juta TKI	4,6	Kemendagri
3	Pengelolaan Informasi Kependudukan	Tersedianya layanan informasi calon TKI tingkat kecamatan di daerah asal calon TKI	a. Jumlah pos pelayanan calon TKI tingkat kecamatan di daerah asal calon TKI	Persiapan	1.500 kecamatan	3.000 kecamatan	4.500 kecamatan	6.500 kecamatan	16,8	Kemendagri

No.	SUBSTANSI INTI / KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PAGU (Rp. MILYAR)	K/L
				2010	2011	2012	2013	2014	Total	
			b. Jumlah calon TKI yang tercatat di pos pelayanan	500 ribu TKI	1 juta TKI	1 juta TKI	1 juta TKI	1 juta TKI		
4	Pelayanan Dokumen Perjalanan Visa dan Fasilitas Keimigrasian	Terselenggaranya akses pelayanan paspor yang mudah dan tidak duplikasi	a. Pelayanan keimigrasian yang transparan	Meningkat 20%	Meningkat 40%	Meningkat 60%	Meningkat 80%	Meningkat 100%	49,1	Kemenkumham
			b. Persentase penerbitan visa yang memenuhi standar dengan data akurat	Meningkat 20%	Meningkat 40%	Meningkat 60%	Meningkat 80%	Meningkat 100%		
			c. Persentase pemberian paspor TKI Timur Tengah yang memenuhi standar	Meningkat 20%	Meningkat 40%	Meningkat 60%	Meningkat 80%	Meningkat 100%		
			d. Jumlah dan jenis fasilitas keimigrasian yang diberikan memenuhi standar	Meningkat 20%	Meningkat 40%	Meningkat 60%	Meningkat 80%	Meningkat 100%		
5	Pembinaan, penempatan, dan perlindungan TKI Luar Negeri	Terintegrasinya pelayanan penempatan calon TKI di daerah	% calon TKI yang terlayani dan tercatat pada Dinas Tenaga Kerja Provinsi dan Kab/Kota	100% calon TKI terlayani	100% calon TKI terlayani	100% calon TKI terlayani	100% calon TKI terlayani	100% calon TKI terlayani	130,0	Kemenakertrans

No.	SUBSTANSI INTI / KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PAGU (Rp. MILYAR)	K/L
				2010	2011	2012	2013	2014	Total	
6	Fasilitasi Pelayanan Dokumen Calon TKI	Meningkatnya kualitas pelayanan penempatan calon TKI	Jumlah calon TKI yang mendapat layanan dokumen sesuai standar	500 ribu TKI	1 juta TKI	1 juta TKI	1 juta TKI	1 juta TKI	19,4	BNP2TKI
7	Penyiapan pemberangkatan	Meningkatnya pemahaman hak dan kewajiban TKI	a. Persentase jumlah calon TKI yang ditempatkan sesuai dengan job order	100% TKI	100% TKI	100% TKI	100% TKI	100% TKI	110,0	BNP2TKI
			b. Jumlah Calon TKI yang Terlayani KTKLN sesuai dengan NIK	500 ribu TKI	1 juta TKI	1 juta TKI	1 juta TKI	1 juta TKI	174,0	
			c. Jumlah TKI yang memahami standar perlindungan dan prinsip-prinsip HAM.	500 ribu TKI	1 juta TKI	1 juta TKI	1 juta TKI	1 juta TKI	244,0	
8	Koordinasi Kebijakan Penyusunan Skim Pembiayaan Kredit untuk Tenaga Kerja Indonesia (TKI)	Meningkatnya Koordinasi Kebijakan Penyusunan Skim Pembiayaan Kredit untuk TKI	Persentase Rekomendasi Kebijakan Koordinasi Pembiayaan Kredit untuk TKI yang Diimplementasikan	60 %	65 %	70 %	75 %	80 %	0,6	Menko Perekonomian
9	Pelayanan Advokasi dan Perlindungan Hukum	Terlaksananya Pelayanan Advokasi dan Perlindungan Hukum TKI	a. Kemudahan penyampaian pengaduan 24 jam (bebas pulsa)	-	1 hotline services	1 hotline services	1 hotline services	1 hotline services	20,0	BNP2TKI
			b. Jumlah pengaduan yang ditangani	100% pengaduan tertangani	100% pengaduan tertangani	100% pengaduan tertangani	100% pengaduan tertangani	100% pengaduan tertangani	15,0	
			c. Kualitas pelayanan hotline service	-	100% TKI yang diproses	100% TKI yang diproses	100% TKI yang diproses	100% TKI yang diproses	30,0	
			d. Jumlah orang yang berminat	-	100% orang	100% orang	100% orang	100% orang	30,0	

No.	SUBSTANSI INTI / KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PAGU (Rp. MILYAR)	K/L
				2010	2011	2012	2013	2014	Total	
			bekerja ke luar negeri yang mendapat advokasi e. Persentase TKI purna bermasalah yang direhabilitasi		teradvokasi	teradvokasi	teradvokasi	teradvokasi	40,0	
10	Pengamanan Keberangkatan	Pencegahan keberangkatan TKI non prosedural	Presentase TKI yang memiliki dokumen resmi bekerja ke luar negeri	100%	100%	100%	100%	100%	15,0	BNP2TKI
11	Peningkatan Pemberdayaan TKI Purna	Kesadaran pengelolaan remitansi untuk kegiatan produktif	Jumlah calon TKI /purna yang mendapat edukasi pengelolaan remitansi	2.000 TKI	3.000 TKI	3.500 TKI	4.000 TKI	4.500 TKI	8,6	BNP2TKI
12	Peningkatan Pemulangan TKI Bermasalah/TKIB	Terlayannya pemulangan TKI bermasalah/TKIB yang dideportasi secara sehat dan bermartabat.	Terselenggaranya koordinasi pemulangan TKI/TKI B dari entry point ke daerah asal	Rapat koordinasi	Rapat koordinasi	Rapat koordinasi	Rapat koordinasi	Rapat koordinasi	4,3	Menko kesra
13	Peningkatan Pelayanan Pemulangan TKI Bermasalah/TKIB	Terlayannya pemulangan TKI bermasalah/TKIB yang dideportasi sampai di daerah asal	Jumlah pemulangan TKI bermasalah/TKIB yang dideportasi	100% TKIB dipulangkan ke daerah asal	100% TKIB dipulangkan ke daerah asal	100% TKIB dipulangkan ke daerah asal	100% TKIB dipulangkan ke daerah asal	100% TKIB dipulangkan ke daerah asal	123,29	Kemensos
14	Peningkatan Ketenteraman, Keterlibatan, dan Perlindungan Masyarakat	Terselenggaranya ketenteraman dan ketertiban umum di lokasi debarkasi dan embarkasi	Kesiap siagaan Satgas entry/Transit/daerah asal	100% TKIB deportasi terlayani	100% TKIB deportasi terlayani	100% TKIB deportasi terlayani	100% TKIB deportasi terlayani	100% TKIB deportasi terlayani	28,8	Kemenda gri

No.	SUBSTANSI INTI / KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PAGU (Rp. MILYAR)	K/L
				2010	2011	2012	2013	2014	Total	
15	Peningkatan Keamanan Pemulangan TKI Bermasalah/TKIB	Tersedianya pengamanan pemulangan TKI bermasalah	Terjaminnya keamanan pemulangan TKI bermasalah/TKIB	100% kasus tertangani	100% kasus tertangani	100% kasus tertangani	100% kasus tertangani	100% kasus tertangani	22,5	POLRI
Peningkatan upaya pelayanan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri										
1	Koordinasi Kebijakan Penyusunan Skim Asuransi dan Remitansi untuk Tenaga Kerja Indonesia (TKI)	Meningkatnya Koordinasi Kebijakan Penyusunan Skim Asuransi dan Remitansi untuk TKI	Persentase Rekomendasi Kebijakan Koordinasi Asuransi dan Remitansi untuk TKI Diimplementasikan	60 %	65 %	70 %	75 %	80 %	1,2	Menko Perekonomian
2	Pembinaan Penempatan dan Perlindungan TKI Luar Negeri	Tersedianya regulasi yang melindungi TKI	a. Ratifikasi konvensi buruh migran dan keluarganya	Penyiapan ratifikasi konvensi buruh migran	Penyiapan ratifikasi konvensi buruh migran	Penyiapan ratifikasi konvensi buruh migran	Penyiapan ratifikasi konvensi buruh migran	Ratifikasi konvensi buruh migran	6,0	Kemenakertrans
			b. Amandemen UU 39/2004	Persiapan amandemen UU 39/2004	Persiapan amandemen UU	Persiapan amandemen UU	Amandemen UU	Amandemen UU	5,5	
			c. Persentase peraturan turunan amandemen UU					100% peraturan turunan tersusun	10,9	
			d. Jumlah atase ketenagakerjaan yang memberi perlindungan TKI	13 atase	13 atase	13 atase	13 atase	13 atase	222,0	
3	Peningkatan Perlindungan dan Pelayanan WNI/BHI di Luar Negeri	Tersedianya bantuan hukum bagi kepentingan TKI	a. Jumlah pertemuan dengan negara sahabat terkait perlindungan WNI/BHI dengan negara lain	5 kali	6 kali	7 kali	8 kali	9 kali	1.120,3	Kemenlu

No.	SUBSTANSI INTI / KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PAGU (Rp. MILYAR)	K/L
				2010	2011	2012	2013	2014	Total	
			b. Jumlah Citizen Services yang diperkuat	24 Citizen Services	24 Citizen Services	24 Citizen Services	24 Citizen Services	24 Citizen Services		
			c. Jumlah WNI/TKI yang memperoleh fasilitas penampungan	-	14.998	8.498	4.998	1.998		
			d. Persentase pemebrian bantuan hukum (Advokasi dan <i>lawyer</i>) bagi WNI	-	29,17%	41,20%	60,10%	100%		
			e. Jumlah WNI/TKI yang deportasi	-	9.608	4.804	4.804	4.804		

PRIORITAS LAINNYA	BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
PENANGGUNGJAWAB	Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan

No	SUBSTANSI INTI / KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PAGU (RP MILIAR)	K/L
				2010	2011	2012	2013	2014	Total	
Pelaksanaan koordinasi terhadap mekanisme prosedur penanganan terorisme										
a.	Operasi Militer Selain Perang (OMSP)	Terlaksananya tugas OMSP secara efektif	Jumlah dan cakupan wilayah penyelenggaraan OMSP	30%	29%	30%	31%	32%	1.485.02	MABES TNI
b.	Kegiatan Penyelenggaraan Dukungan Administrasi Operasi Intelijen	Terseleenggaranya dukungan administrasi operasi intelijen	Jumlah anggaran yang tersedia	30%	30%	30%	31%	32%	1.055.29	BADAN INTELIJEN NEGARA
c.	Pembinaan forum kemitraan Polisi dan Masyarakat	Meningkatny jumlah forum kemitraan Polisi dan msyarakat	Jumlah Forum Kemitraan Polmas	41.000	45.100	49.600	54.560	60.000	824.47	POLRI
d.	Penindakan Tindak Pidana Terorisme	Meningkatnya penyelesaian penanganan perkara Terorisme	Jumlah Perkara dan Clearance Rate Tindak Pidana Terorisme Ik Nasional	100%	100%	102%	102%	103%	59.67	POLRI
e.	Kegiatan Koordinasi Penanganan Kejahatan Transnasional dan Terorisme	Terseleenggaranya Koordinasi Kebijakan Penanganan Kejahatan Transnasional dan Terorisme	Jumlah Rakor Urusan Kejahatan Transnasional dan Terorisme	12 kali	12 kali	12 kali	12 kali	12 kali	3,959	Kemenko Polhukam
			Jumlah pemantauan dan evaluasi	4 kali	4 kali	4 kali	4 kali	4 kali		
			Jumlah Rakor Urusan Terorisme Bersama dengan DKPT	12 kali	12 kali	12 kali	12 kali	12 kali		
Pelaksanaan program deradikalisasi untuk menangkal terorisme										
a	Peningkatan Wawasan Kebangsaan melalui Sosialisasi yang Berkelanjutan	Terlaksananya penyusunan kebijakan, dukungan & fasilitasi pengembangan nilai-nilai Kebangsaan	Jumlah modul pengembangan nilai kebangsaan	NA	1 Modul	1 Modu	1 Modul	1 Modul	7,80	Kemendagri
			Jumlah sosialisasi pengembangan nilai kebangsaan untuk pemuda, perempuan,	NA	15 kali	20 kali	25 kali	25 kali	30,00	

No	SUBSTANSI INTI / KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PAGU (RP MILIAR) Total	K/L
				2010	2011	2012	2013	2014		
			aparatur pemerintah							
b	Kegiatan Koordinasi Wawasan Kebangsaan	Terselenggaranya Koordinasi Kebijakan Wawasan Kebangsaan	Jumlah Rakor Wawasan Kebangsaan	12 kali	12 kali	12 kali	12 kali	12 kali	3,431	Kemenko Polhukam
			Jumlah pemantauan dan evaluasi	4 kali	4 kali	4 kali	4 kali	4 kali		
c	Ops Gaktib dan Ops Yustisi.	Meningkatnya kondisi ketertiban di daerah rawan.	Prosentase kualitas dan kuantitas operasi Gaktib.	45%	44%	45%	46%	47%	95.60	MABES TNI
d	Operasi Pemberdayaan Wilayah Pertahanan	Terselenggaranya operasi wilayah pertahanan	Prosentase kualitas dan kuantitas pembinaan wilayah pertahanan nasional	45%	44%	45%	46%	47%	54.68	MABES TNI
e	Operasi intelijen Strategis	Dapat ditangkalnya ATHG pertahanan negara.	Prosentase kualitas dan kuantitas data intelijen dan pengamanan yang dibutuhkan	45%	44%	45%	46%	47%	267.57	MABES TNI
f	Operasi Militer Selain Perang (OMSP).	Terlaksananya tugas OMSP secara efektif	Jumlah dan cakupan wilayah penyelenggaraan OMSP	30%	29%	30%	31%	32%	1,485.02	MABES TNI
g	Penyelenggaraan Intelijen dan Pengamanan Matra Darat	Kesiapan kekuatan dan kemampuan matra darat	% Peningkatan Pengamanan Personel, Material dan Dokumen serta Efektifitas dan Efisiensi Deteksi Dini	40%	40%	41%	43%	45%	731.85	TNI AD
h	Kegiatan Operasi Intelijen Dalam Negeri	Meningkatnya pelaksanaan penyelidikan beraspek dalam negeri	Rasio personil daerah terhadap jumlah kabupaten/kota	30%	30%	30%	32%	33%	1,362.56	BADAN INTELIJEN NEGARA
Peningkatan peran Republik Indonesia dalam mewujudkan perdamaian dunia										
a	Peran Indonesia dalam Reformasi PBB dan Dewan Keamanan PBB dan kontribusi Indonesia dalam Menjaga Perdamaian Dunia	Meningkatnya partisipasi Indonesia dalam setiap forum PBB dan DK PBB	Jumlah prakarsa Indonesia untuk mendorong reformasi Dewan Keamanan PBB.	4 kali prakarsa	4 kali prakarsa	4 kali prakarsa	4 kali prakarsa	4 kali prakarsa	20,64	Kemenlu
		Meningkatnya kerjasama multilateral untuk menjaga perdamaian dunia dalam isu keamanan internasional, senjata pemusnah massal dan senjata	Jumlah koordinasi teknis	19 kali	25 kali	25 kali	25 kali	25 kali		
			Jumlah posisi pemri yang disampaikan dalam sidang internasional	10 posisi	10 posisi	10 posisi	10 posisi	10 posisi		
			Jumlah partisipasi Indonesia pada sidang	7 kali	7 kali	7 kali	7 kali	7 kali		

No	SUBSTANSI INTI / KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PAGU (RP MILIAR) Total	K/L
				2010	2011	2012	2013	2014		
		konvensional, kejahatan lintas negara dan terorisme	internasional yang dihadiri							
			Jumlah penyelenggaraan pertemuan/kerja sama	-----	2 kali	1 kali	-----	-----		
Peningkatan pelayanan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri										
a	Perluasan, Pengembangan dan penguatan sistem pelayanan warga (<i>citizen service</i>)	Terlaksananya penguatan sistem pelayanan warga (<i>citizen service</i>)	Jumlah citizen services yang diperkuat	24	24	24	24	24	139,405	Kemenlu
b	Pertemuan dan perundingan dengan negara sahabat	Terlaksananya pertemuan dan perundingan dengan negara sahabat terkait dengan perlindungan WNI/BHI	Jumlah pertemuan dengan negara sahabat terkait perlindungan WNI/BHI dengan negara lain	5 kali	6 kali	7 kali	8 kali	9 kali	8,45	Kemenlu
c	Penanganan Kasus TKI di luar negeri	Tertanganinya kasus TKI di luar negeri	Tersedianya database mengenai penyebaran WNI terdaftar di seluruh perwakilan di luar negeri	Database WNI/BHI di seluruh perwakilan	Database WNI/BHI di seluruh perwakilan	Database WNI/BHI di seluruh perwakilan	Database WNI/BHI di seluruh perwakilan	Database WNI/BHI di seluruh perwakilan	1,69	Kemenlu
			Jumlah WNI/TKI yang memperoleh fasilitas di penampungan	-	14.998	8.498	4.998	1.998	970,17	
			Jumlah WNI/TKI yang direpatiasi	-	6.500	3.500	3.000	1.998	58,23	
			Jumlah WNI/TKI yang dideportasi	-	9.608	4.804	4.804	4.804	58,23	
			Prosentase pemberian bantuan hukum (advokasi dan lawyer) bagi WNI terutama tenaga kerja wanita	-	29,17%	41,20%	60,10%	100%	10,16	
			Jumlah laporan monitoring dan evaluasi pelayanan dan perlindungan WNI/TKI	-	100%	100%	100%	100%	3,2	
d	Sosialisasi dan Koordinasi Teknis	Terlaksananya sosialisasi dan koordinasi teknis pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri	Jumlah sosialisasi untuk PJTKI tentang pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri	3 kali	3 kali	3 kali	3 kali	3 kali	1,69	Kemenlu
			Jumlah koordinasi dengan instansi terkait	65 kali	70 kali	80 kali	85 kali	90 kali	1,69	

No	SUBSTANSI INTI / KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PAGU (RP MILIAR)	K/L
				2010	2011	2012	2013	2014	Total	
			baik di dalam maupun di luar negeri							
			Jumlah kota yang menjadi program diseminasi perlindungan WNI melalui media elektronik	15 kota	20 kota	25 kota	30 kota	35 kota	1,69	
			Jumlah tayangan iklan tentang pelayanan dan perlindungan WNI/BHI di luar negeri	6 kali	10 kali	15 kali	20 kali	25 kali	1,69	
Penguatan dan pematapan hubungan kelembagaan pencegahan dan pemberantasan korupsi										
a	Penanganan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi	Meningkatnya penyelesaian perkara tindak pidana korupsi secara cepat, tepat dan akuntabel.	Jumlah Penyidikan perkara tindak pidana Korupsi yang diselesaikan	145 pkr	145 pkr	145 pkr	145 pkr	145 pkr	53.33	Kejagung
b	Peningkatan Penuntutan Tipikor	Meningkatnya penyelesaian perkara tipikor secara cepat, tepat dan akuntabel	Jumlah perkara tindak pidana korupsi yang diselesaikan dalam tahap Penuntutan	145 pkr	100 pkr	100 pkr	100 pkr	100 pkr	18.96	Kejagung
c	Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi di Kejati, Kejari dan Cabjari	Meningkatnya penyelesaian perkara tipikor secara cepat, tepat & akuntabel yang dilaksanakan oleh jajaran Kejaksaan di daerah	Jumlah perkara tindak pidana korupsi yang diselesaikan oleh Kejati, Kejari dan Cabjari	1.700 pkr	1.400 pkr	1.400 pkr	1.400 pkr	1.400 pkr	736.8	Kejagung
Pelaksanaan perlindungan saksi dan pelapor										
a	Kegiatan Perancangan Peraturan Perundang-undangan	Peningkatan kualitas RUU dan peraturan perundang-undangan di bawah UU di DPR serta tenaga fungsional perancang peraturan perundang-undangan	<ul style="list-style-type: none"> • Bidang politik, hukum & keamanan • Bidang keuangan dan perbankan • Bidang industri dan perdagangan • Bidang kesejahteraan rakyat • Bidang pertanahan, tata ruang, dan LH • Peraturan Perundang-undangan di bidang mekanisme perlindungan saksi dan pelapor 	20%	40%	60%	80%	100%	75,0	Kemenkumham

No	SUBSTANSI INTI / KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PAGU (RP MILIAR)	K/L
				2010	2011	2012	2013	2014	Total	
			<ul style="list-style-type: none"> Peraturan Perundang-undangan di bidang yg mendorong pemberantasan korupsi 							
Pengembalian aset (<i>asset recovery</i>)										
a	Kegiatan Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan	Meningkatkan keharmonisan rancangan peraturan perundang-undangan tingkat pusat bidang politik, hukum, keamanan, keuangan, perbankan, industri, perdagangan, sumber daya alam, riset, teknologi, kesejahteraan rakyat yang harmonis	<ul style="list-style-type: none"> Bidang politik, hukum & keamanan Bidang keuangan dan perbankan Bidang industri dan perdagangan Bidang kesejahteraan rakyat Bidang pertanahan, tata ruang, dan LH Peraturan perundang-undangan di bidang mekanisme perlindungan saksi dan pelapor Peraturan perundang-undangan di bidang yg mendorong pemberantasan korupsi 	20%	40%	60%	80%	100%	38.5	Kemenkumham
b	Kegiatan Peningkatan Profesionalitas Tenaga Teknis Peradilan dan Aparatur Peradilan di bidang Manajemen dan Kepemimpinan	Tersedianya sumber daya aparatur hukum yang profesional dan kompeten dalam melaksanakan penyelenggaraan peradilan	<ul style="list-style-type: none"> Jmlh SDM mendapatkan pelatihan teknis peradilan dan manajemen & Kepemimpinan yang memenuhi standar kompetensi, tugas dan kinerja Jmlh pelatihan bagi Hakim/Hakim Adhoc dan tenaga teknis lainnya mengenai Tipikor, asset recovery dll Jmlh kurikulum, silabus, materi ajar yg dikembangkan berdasarkan kebutuhan pelatihan Jmlh pengembangan sistem diklat yang 	3.826 org	6.450 org	7.860 org	7.880 org	8.290 org	203.5	MA-RI

No	SUBSTANSI INTI / KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PAGU (RP MILIAR)	K/L
				2010	2011	2012	2013	2014	Total	
			terhubung dengan sistem rekrutmen, sistem pengawasan dan sistem karir bagi hakim dan aparatur peradilan							
c	Pelayanan Penyusunan Peraturan Perundang – Undangan dan kerjasama hukum	Meningkatnya pemberian pertimbangan hukum kepada satuan organisasi Kejaksaan dan instansi pemerintah, serta turut melakukan penelaahan & penyusunan perumusan peraturan perundang-undangan & pembinaan hubungan dengan lembaga negara, lembaga pemerintah dan lembaga lain baik di dalam maupun di luar negeri.	Jumlah kegiatan kerja sama hukum untuk penyusunan kesepakatan MLA dalam rangka penelusuran dan pengembalian aset negara hasil tindak pidana korupsi yang disembunyikan di luar negeri.	7 keg	8 Keg	10 keg	10 keg	10 keg	8,57	Kejaksanaan Agung
Peningkatan kepastian hukum										
a	Kegiatan Percepatan peningkatan penyelesaian perkara	Terselesaikannya penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah penyelesaian perkara termasuk perkara-perkara yg menarik perhatian masyarakat (KKN, HAM) Jumlah penyelesaian minutas perkara yg tepat waktu. Terselenggaranya pengelolaan informasi administrasi perkara secara akurat, efektif dan efisien Tersedianya biaya penyelesaian perkara yang memadai 	10.000 pkr	10.200 pkr	10.300 pkr	10.400 Pkr	10.500 pkr	146,9	MA-RI
b	Kegiatan Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan penyelesaian dan penanganan perkara	<ul style="list-style-type: none"> Jmlh penyelesaian administrasi perkara (yg sederhana, dan tepat waktu) di tingkat Pertama dan Banding di lingkungan Peradilan Umum Jmlh penyelesaian perkara yg kurang 	145.000 pkr	147.900 pkr	149.380 pkr	150.870 pkr	153.100 pkr	320.2	MA-RI

No	SUBSTANSI INTI / KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PAGU (RP MILIAR)	K/L
				2010	2011	2012	2013	2014	Total	
			dari 6 bulan <ul style="list-style-type: none"> • Jmlh penyampaian berkas perkara Kasasi, PK dan Grasi yang lengkap dan tepat waktu • Penyusunan kebijakan mengenai manajemen dan tata laksana di lingkungan Peradilan Umum 							
c	Kegiatan Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Peningkatan penyelesaian dan penanganan perkara	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah penyelesaian administrasi perkara (yang sederhana, dan tepat waktu) di tingkat pertama dan banding di lingkungan Peradilan Agama • Jumlah penyelesaian perkara yang kurang dari 6 (enam) bulan • Jumlah penyampaian berkas perkara kasasi, PK dan kesyahriaan yang lengkap dan tepat waktu • Penyusunan kebijakan mengenai manajemen dan tata laksana di lingkungan Peradilan Umum 	80.000 pkr	81.600 pkr	82.400 pkr	83.200 pkr	84.400 pkr	102.8	MA-RI
d	Kegiatan Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan TUN	Peningkatan penyelesaian dan penanganan perkara	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah penyelesaian administrasi perkara (yg sederhana, dan tepat waktu) di tingkat Pertama & Banding di lingkungan Peradilan Peradilan Militer dan TUN • Jumlah Penyelesaian Perkara yang kurang dari 6 (enam) bulan • Jumlah penyampaian berkas perkara Kasasi, PK dan Grasi yang lengkap dan 	5.000 pkr	5.100 pkr	5.151 pkr	5.200 pkr	5.280 pkr	26	MA-RI

No	SUBSTANSI INTI / KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PAGU (RP MILIAR) Total	K/L
				2010	2011	2012	2013	2014		
			tepat waktu • Penyusunan kebijakan mengenai manajemen dan tata laksana di lingkungan Peradilan Umum							
Penguatan perlindungan HAM										
a	Kegiatan Kerjasama HAM	Peningkatan kerjasama dalam dan luar negeri dlm rangka pemajuan HAM dan harmonisasi rancangan peraturan Perundang-undangan dalam perspektif HAM serta Naskah Akademik (NA) instrmnt HAM internasional	Persentase harmonisasi rancangan peraturan perUUan dalam perspektif HAM	100%	100%	100%	100%	100%	9.0	Kemenkumham
			Jumlah analisis laporan pelaksanaan instrument HAM Internasional dan Naskah Akademik instrmnt HAM Internasional	6 instrmnt. HAM Internasional dan 2 N.A	6 instrmnt HAM Internasional dan 2 N.A	6 instrmnt HAM Internasional dan 2 N.A	6 instrmnt HAM Internasional dan 2 N.A	6 instrmnt HAM Internasional dan 2 N.A		
			Jumlah kerjasama luar negeri dalam rangka pemajuan HAM	10 Negara/ NGO;	10 Negara/ NGO;	10 Negara/ NGO;	10 Negara/ NGO;	10 Negara/ NGO;		
			Jumlah kerjasama dalam negeri dalam rangka implementasi HAM/RANHAM	440 pusat dan daerah	440 pusat dan daerah	440 pusat dan daerah	440 pusat dan daerah	440 pusat dan daerah		
b	Kegiatan Penguatan HAM	Presentasi KL pemerintah propinsi dan kabupaten/ klayon telah mengikuti pelatihan HAM	Jumlah program pembelajaran HAM	10	10	10	10	10	10.0	Kemenkumham
			Jumlah bahan ajar HAM	10	10	10	10	10		
			Jumlah fasilitator pelatihan HAM	40	40	40	40	40		
			Jumlah pelatihan HAM	10	10	10	10	10		
			Jumlah K/L atau daerah yg telah melaksanakan RAN HAM	34 kab/kota	34 kab/kota	34 kab/kota	34 kab/kota	34 kab/kota		
			Jumlah penyuluh HAM	136	136	136	136	136		

No	SUBSTANSI INTI / KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PAGU (RP MILIAR)	K/L
				2010	2011	2012	2013	2014	Total	
c	Kegiatan Diseminasi HAM	Meningkatnya Ke-menterian/Lembaga, Pemerintah Propinsi dan Kab/Kota yang telah memperoleh diseminasi HAM	Jumlah evaluasi dan pengembangan diseminasi HAM	34 kab/kota	34 kab/kota	34 kab/kota	34 kab/kota	34 kab/kota	8.0	Kemenkumham
			Jumlah data HAM yg diolah dari K/L, Prov, Kab & Kota	156	156	156	156	226		
			Jumlah evaluasi dan laporan tentang HAM	156	156	156	156	226		
d	Kegiatan Informasi HAM	Informasi yang dapat diakses dari K/L, Provinsi dan Kabupaten/Kota tentang HAM	Jumlah akses jalur informasi HAM melalui penyediaan koneksi internet	156	156	156	156	226	7.0	Kemenkumham
			Jumlah layanan informasi melalui media cetak dan elektronik	156	156	156	156	226		
e	Kegiatan Penyediaan dana bantuan hukum di Pengadilan Umum Tingkat Pertama	Penyelesaian perkara pidana bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Jumlah penyediaan dana bantuan hukum di Pengadilan Tingkat Pertama Kebijakan mengenai bantuan hukum bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan Jumlah pembangunan atau perbaikan fungsi operasionalisasi Zitting Plaatz dan pelaksanaan sidang keliling untuk menjangkau segenap lapisan masyarakat	33.960 pkr	34.639 pkr	34.986 pkr	35.335 pkr	35.865 pkr	174.7	MA-RI
f	Kegiatan Penyediaan dana bantuan hukum di Pengadilan Agama	Penyelesaian perkara peradilan agama bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Penyediaan dana prodeo di pengadilan Tingkat Pertama	372 satker	388 satker	388 satker	388 satker	388 satker	102.7	MA-RI
			Mengoptimalkan fungsi pelaksanaan sidang keliling untuk menjangkau segenap lapisan masyarakat							
g	Kegiatan Penyediaan dana bantuan hukum di Pengadilan Militer dan TUN	Penyelesaian perkara peradilan Militer dan TUN di wilayah yang belum terjangkau peradilan Militer dan TUN	Pelaksanaan sidang keliling (hakim terbang) untuk menjangkau segenap lapisan masyarakat	23 satker	23 satker	23 satker	23 satker	23 satker	26	MA-RI

No	SUBSTANSI INTI / KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PAGU (RP MILIAR)	K/L
				2010	2011	2012	2013	2014	Total	
h	Penanganan Penyidikan Pelanggaran HAM yang Berat	Meningkatnya penyelesaian penanganan perkara pelanggaran HAM yang berat secara cepat, tepat dan akuntabel.	Jumlah penyidikan perkara pelanggaran HAM yang berat yang diselesaikan	10 pkr	5 pkr	5 pkr	5 pkr	5 pkr	0,79	Kejaksanaan Agung
i	Peningkatan Penuntutan pelanggaran HAM yang Berat	Meningkatnya penyelesaian perkara pelanggaran HAM yang berat secara cepat, tepat dan akuntabel	Jumlah perkara pelanggaran HAM yang berat yang diselesaikan dalam tahap penuntutan.	5 pkr	5 pkr	5 pkr	5 pkr	5	0,54	Kejaksanaan Agung
Pemberdayaan industri strategis bidang pertahanan										
a	Penyusunan Rencana induk, master plan dan road map revitalisasi industri pertahanan	Tersusunnya rencana pengembangan & pengadaan alutsista TNI dan Alut Polri 2010 – 2014	Dokumen rencana pengembangan dan pengadaan	50%	50%	-	-	-	-	Kemenhan/TNI POLRI
b	Konsolidasi RPJMN 2010-2014 beserta RKP, Penguatan basis pendanaan, dan Perumusan Kerangka Pendanaan 5 thn	Tersusunnya mekanisme pendanaan Industri Pertahanan dalam negeri yang bersifat multiyears	Rumusan pendanaan Industri Pertahanan Dalam Negeri yang bersifat multiyears	100%	-	-	-	-	-	Kemenhan/TNI POLRI
c	Revisi Keppres 80 Tahun 2003 untuk mendukung revitalisasi industri pertahanan	Tersedianya payung hukum untuk mendukung revitalisasi industri pertahanan	Ditetapkannya Keppres Pengadaan barang dan jasa	100%	-	-	-	-	-	LKPP Kemenhan/TNI POLRI
d	Identifikasi teknologi – Alutsista TNI dan Alut POLRI yang dibutuhkan dalam PJP I	Tersedianya data kemampuan produksi alutsista TNI dan Alut Polri oleh Industri Pertahanan dalam Negeri	Jumlah item produk alutsista TNI dan Alut Polri yang mampu diproduksi oleh Industri Pertahanan dalam Negeri	25%	25 %	50%	-	-	-	Bappenas Kemenhan/TNI POLRI
e	Pembentukan Komite Kebijakan Industri Pertahanan sbg <i>Clearing House</i>	Tersedianya badan <i>Clearing House</i> lintas bidang dan lintas K/L	Efisiensi dan Efektivitas pengadaan Alutsista TNI dan Alut POLRI	100%	-	-	-	-	-	Bappenas Kemenhan/TNI POLRI

No	SUBSTANSI INTI / KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PAGU (RP MILIAR)	K/L
				2010	2011	2012	2013	2014	Total	
f	Refocusing, intensifikasi dan kolaborasi R & D	Terwujudnya model dan/atau prototype alat peralatan pertahanan matra darat, laut, dan udara yang sesuai dengan kemajuan IPTEK dan mampu dikembangkan secara mandiri	Jumlah model dan/ atau prototype alat peralatan pertahanan matra darat, laut, dan udara yang sesuai dengan kemajuan IPTEK dan mampu dikembangkan secara mandiri	30%	30 %	30%	30 %	30 %	-	Kemenhan/TNI
g	Penelitian, dan pengembangan alat peralatan pertahanan	Terwujudnya model dan/ atau prototype alat peralatan pertahanan matra darat, matra laut dan matra udara yang sesuai kemajuan IPTEK dan mampu dikembangkan secara mandiri	Jumlah model dan/ atau prototype alat peralatan pertahanan matra darat, matra laut dan matra udara yang sesuai kemajuan IPTEK dan mampu dikembangkan secara mandiri	30%	30%	30%	30%	30%	19.29	Kemenhan
h	Produksi Alutsista Industri dalam negeri	Meningkatnya produksi Alutsista Industri darat dalam negeri	Jumlah produksi Alutsista Industri dalam negeri	20%	24%	25%	25%	25%	7100.00	Kemenhan
i	Pengkajian dan pengembangan peralatan sandi	Tersedianya kajian pengembangan peralatan sandi	Jumlah hasil pengkajian dan pengembangan peralatan sandi	3	3	2	3	2	22.77	LSN
j	Pengembangan Alut Kepolisian Produksi Dalam Negeri	Meningkatkan kemandirian alut Polri produksi dalam negeri	Jumlah dan jenis peralatan utama dan peralatan teknis Polri yang memenuhi standar keamanan internasional.	20%	20%	25%	25%	25%	1,000.00	POLRI
k	Pembuatan Prototype	Meningkatkan Kemandirian Polri dalam memberikan yanmas	Jumlah Prototype yang dihasilkan	5	4	3	5	5	43.11	POLRI
l	Pengkajian dan Penerapan Teknologi Industri Pertahanan dan Keamanan	Termanfaatkannya teknologi pertahanan, keamanan dan keselamatan	Prototipe pesawat udara nir awak	1					10,02	BPPT
			Rekomendasi		1	1	1	1		
m	Peningkatan dukungan teknologi bagi pemberdayaan industri strategis bidang pertahanan	Kebijakan dukungan teknologi untuk revitalisasi industri pertahanan	Jumlah kebijakan	1	1	1	1	1	25,00	KRT
			Jumlah kegiatan ber sama hasil koordinasi dan sinkronisasi	1	1	1	1	1		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2010
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH NASIONAL
(RPJMN)
TAHUN 2010--2014**

**BUKU II
MEMPERKUAT SINERGI ANTARBIDANG PEMBANGUNAN**

**BAB I
KEBIJAKAN PENGARUSUTAMAAN DAN LINTAS BIDANG**

**Diperbanyak Oleh:
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS)
2010**



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
BAB I KEBIJAKAN PENGARUSUTAMAAN DAN LINTAS BIDANG	II.1-1
1.1 Pengarusutamaan	II.1-2
1.1.1 Pengarusutamaan Pembangunan Berkelanjutan	II.1-2
1.1.2 Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	II.1-7
1.1.3 Pengarusutamaan Gender	II.1-13
1.2 Kebijakan Lintas Bidang.....	II.1-24
1.2.1 Penanggulangan Kemiskinan.....	II.1-24
1.2.1.1 Kondisi Umum	II.1-24
1.2.1.2 Permasalahan dan Sasaran	II.1-28
1.2.1.3 Strategi dan Arah Kebijakan.....	II.1-34
1.2.2 Perubahan Iklim Global.....	II.1-37
1.2.2.1 Kondisi Umum	II.1-37
1.2.2.2 Permasalahan dan Sasaran	II.1-39
1.2.2.3 Strategi dan Arah Kebijakan.....	II.1-39
1.2.3 Pembangunan Kelautan Berdimensi Kepulauan.....	II.1-40
1.2.3.1 Kondisi Umum	II.1-40
1.2.3.2 Permasalahan dan Sasaran	II.1-41
1.2.3.3 Strategi dan Arah Kebijakan.....	II.1-43
1.2.4 Perlindungan Anak.....	II.1-43
1.2.4.1 Kondisi Umum	II.1-43
1.2.4.2 Permasalahan dan Sasaran	II.1-44
1.2.4.3 Strategi dan Arah Kebijakan.....	II.1-46



BAB I

KEBIJAKAN PENGARUSUTAMAAN DAN LINTAS BIDANG

Sesuai dengan amanat UU No. 25 Tahun 2004, terdapat 5 (lima) tujuan pelaksanaan sistem perencanaan pembangunan nasional, yaitu untuk mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan; menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antardaerah, antarruang, antarwaktu, dan antarfungsi pemerintah, maupun antarpusat dan daerah; menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan; mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan. Oleh karena itu, sesuai dengan pembahasan dalam buku ini, maka tema yang menjiwai Buku II adalah **memperkuat sinergi antarbidang**.

Sinergi antarbidang pembangunan sangat penting untuk kelancaran pelaksanaan dan tercapainya berbagai sasaran dalam RPJMN 2010-2014. Pada dasarnya pembangunan di setiap bidang untuk mencapai keberhasilan, tidak dapat berdiri sendiri, tetapi saling terkait dengan pembangunan di bidang lainnya. Dengan pembiayaan yang terbatas, untuk mencapai efektifitas, efisiensi dan hasil yang maksimal dalam mencapai sasaran pembangunan, harus dilakukan sinkronisasi pembangunan di setiap bidang sehingga kegiatan di setiap bidang saling terpadu, mendukung dan saling memperkuat. Setiap kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian yang melaksanakan pembangunan di setiap bidang harus memiliki komitmen yang kuat untuk mencapai sinergi tersebut melalui proses komunikasi, konsultasi, koordinasi serta monitoring, dan evaluasi dengan pemangku kepentingan terkait di pusat dan daerah dan mengedepankan keberhasilan bersama dalam pencapaian sasaran pembangunan.

Selanjutnya, di dalam melaksanakan pembangunan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah ini terdapat prinsip pengarusutamaan yang menjadi landasan operasional bagi seluruh pelaksanaan pembangunan. Prinsip-prinsip pengarusutamaan ini diarahkan untuk dapat tercermin di dalam keluaran pada kebijakan pembangunan. Prinsip-prinsip pengarusutamaan ini akan menjadi jiwa dan semangat yang mewarnai berbagai kebijakan pembangunan di setiap bidang pembangunan. Diharapkan dengan dijiwainya prinsip-prinsip pengarusutamaan itu, pembangunan jangka menengah ini akan memperkuat upaya mengatasi berbagai permasalahan yang ada.

Pengarusutamaan dilakukan dengan cara yang terstruktur dengan kriteria sebagai berikut: (1) pengarusutamaan bukanlah merupakan upaya yang terpisah dari kegiatan pembangunan sektoral; (2) pengarusutamaan tidak mengimplikasikan adanya tambahan pendanaan (investasi) yang signifikan; dan (3) pengarusutamaan dilakukan pada semua sektor terkait namun diprioritaskan pada sektor penting yang terkait

langsung dengan isu-isu pengarusutamaan.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2010-2014 ini juga diarahkan untuk menjadi sebuah rencana kerja jangka menengah yang bersifat menyeluruh. Persoalan yang bersifat lintas bidang harus ditangani secara holistik dan tidak terfragmentasi sehingga dapat menyelesaikan persoalan yang sebenarnya. Pencapaian kinerja pembangunan tersebut menjadi komitmen semua pihak khususnya instansi pemerintah untuk dapat merealisasikannya secara sungguh-sungguh demi kepentingan rakyat dan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, disusun pula rencana kerja yang bersifat lintas bidang. Kebijakan lintas bidang ini akan menjadi sebuah rangkaian kebijakan antarbidang yang terpadu meliputi prioritas, fokus prioritas serta kegiatan prioritas lintas bidang untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan yang semakin kompleks.

1.1 Pengarusutamaan

1.1.1 Pengarusutamaan Pembangunan Berkelanjutan

Pembangunan berkelanjutan adalah proses pembangunan yang berprinsip untuk memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan. Untuk mencapai keberlanjutan yang menyeluruh, diperlukan keterpaduan antara 3 pilar pembangunan, yaitu keberlanjutan dalam aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Tiga pilar utama tersebut yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan saling berintegrasi dan saling memperkuat satu dengan yang lain. Untuk itu tiga aspek tersebut harus diintegrasikan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan agar tercapai pembangunan berkelanjutan yang selain dapat menjaga lingkungan hidup/ekologi dari kehancuran atau penurunan kualitas, juga dapat menjaga keadilan sosial dengan tidak mengorbankan kebutuhan pembangunan ekonomi.

Indonesia telah menyusun *National Sustainable Development Strategy (Agenda 21)* pada tahun 1997 yang berisi rekomendasi kepada sektor dalam penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan hingga tahun 2020. Selain itu telah pula ditetapkan bahwa pembangunan berkelanjutan menjadi salah satu tema yang diarusutamakan dalam Rencana Kerja Pemerintah setiap tahun pada RPJM 2004-2009. Namun, hingga saat ini belum ada suatu sistem, serta mekanisme yang andal untuk melakukan pengintegrasian isu pembangunan berkelanjutan tersebut ke dalam program-program pembangunan secara terarah.

Beberapa persoalan yang akan dihadapi dalam pembangunan 5 tahun ke depan adalah mengintegrasikan isu keberlanjutan dalam pembangunan ekonomi dan sosial. Walaupun sudah dilakukan berbagai upaya untuk menanggulangi kerusakan lingkungan hidup, pencemaran dan penurunan kualitas daya dukung lingkungan hidup terus terjadi. Untuk itu, diperlukan pengelolaan lingkungan hidup yang terintegrasi dari hulu ke hilir dan lintas sektoral. Selain itu, diperlukan suatu upaya pengintegrasian pembangunan



berkelanjutan ke dalam pembangunan sektoral.

Banyaknya pemangku kepentingan yang berperan dalam pembangunan berkelanjutan mengharuskan adanya koordinasi serta sinergi yang baik antarberbagai pihak tersebut. Setiap pihak mempunyai peran dan fungsi dalam menggerakkan subsistem yang membentuk sistem pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu, pembangunan berkelanjutan harus bersifat membuka akses seluruh pihak agar dapat berperan aktif dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan itu. Pemerintah diharapkan dapat memberikan arah, kebijakan, standar-standar, manual, serta kerangka kebijakan penunjang lainnya yang berkaitan dengan pembangunan berkelanjutan.

Sasaran pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan adalah (1) teradopsinya secara integral pertimbangan ekonomi, sosial, lingkungan, dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di berbagai sektor dan daerah; (2) terpeliharanya kualitas lingkungan hidup yang ditunjukkan dengan membaiknya indeks kualitas lingkungan hidup dalam 5 tahun ke depan; dan (3) disepakati, disusun, dan digunakannya indeks kualitas lingkungan hidup sebagai salah satu alat untuk mengukur pembangunan yang berkelanjutan.

Selanjutnya, pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan dilakukan dengan memperhatikan **aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi** dalam menyusun kerangka strategis, struktur kelembagaan, strategi dan kebijakan nasional, sektoral dan wilayah, serta dalam proses perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan. Pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan juga harus dilakukan dengan memperhatikan permasalahan strategis lingkungan dan sosial yang ada.

Pengarusutamaan dilakukan dengan cara yang terstruktur dengan kriteria sebagai berikut: (1) kegiatannya merupakan upaya integral dalam kegiatan pembangunan sektoral dan kewilayahan; (2) kegiatan tidak mengimplikasikan adanya tambahan pendanaan (investasi) yang signifikan karena berasaskan koordinasi dan sinergi; (3) pembangunan dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi sosial kemasyarakatan; (4) kondisi daya dukung dan daya tampung lingkungan dalam proses perencanaan dan pelaksanaannya; dan (5) pengarusutamaan dilakukan di semua sektor dan wilayah/daerah, diprioritaskan pada kegiatan strategis pelestarian daya dukung dan daya tampung lingkungan serta keadilan dan keberlanjutan sosial.

Kegiatan pembangunan tidak mengabaikan kemampuan daya dukung lingkungan yang menopang kegiatan pembangunan tersebut. Tiga indikator daya dukung lingkungan utama sebagai penopang pembangunan adalah daya dukung lahan, daya dukung air, dan udara. Dalam kerangka pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan dalam periode 2010-2014, karena keterbatasan sumber daya serta untuk menanggulangi permasalahan yang lebih mendasar diperlukan prioritas dan fokus aspek lingkungan yang akan dilestarikan dalam waktu lima tahun ke depan. Dengan pelestarian daya dukung lahan yang meningkat, diharapkan terjadi pula proses pelestarian sumber daya air dan udara. Pelestarian daya dukung lahan dan air harus

dipertimbangkan dalam setiap perencanaan program dan kegiatan sektor, yang di dalamnya diupayakan agar dampak negatif program dan kegiatan tersebut dapat diminimalkan terhadap sumber daya lahan dan air.

Daya dukung sumber daya lahan dapat dilihat dari (1) daya serap air (infiltrasi air), (2) kualitas lahan, (3) tutupan lahan, dan (4) laju erosi lahan. Kegiatan pembangunan hendaknya memperhatikan daya dukung sumber daya lahan itu.

Kegiatan pembangunan diupayakan agar tidak menurunkan daya serap lahan terhadap air yang mengalir di atasnya dan tidak menambah tingkat aliran air permukaan (*run off*) yang ada di atasnya sehingga ketersediaan sumber daya air dapat terus dipertahankan dan erosi lahan tidak terjadi. Upaya melestarikan daya serap air ini dapat dilakukan dengan mempertahankan tutupan lahan, bentang alam, dan kualitas lahan, serta dengan bantuan teknologi, seperti sumur resapan dan biopori. Kegiatan pembangunan juga diupayakan tidak mengakibatkan terjadinya degradasi lahan yang ada. Untuk itu, perlu diupayakan pelestarian kualitas lahan yang meliputi pelestarian struktur tanah, bahan kimiawi tanah, air dan unsur hara, serta proses aerasi yang ada. Lebih lanjut, kegiatan pembangunan diupayakan tidak menurunkan luas tutupan lahan yang ada karena penting untuk mempertahankan kualitas dan daya serap air dari lahan itu sendiri. Akhirnya, kegiatan pembangunan tidak menambah laju erosi lahan yang ada sehingga tidak menimbulkan masalah sedimentasi dan bencana lingkungan lain di daerah hulu.

Daya dukung sumber daya air dapat dilihat dari kualitas air, diupayakan agar kegiatan pembangunan yang ada tidak menurunkan kualitas air setempat dan kuantitas air, diupayakan agar kegiatan pembangunan yang memanfaatkan air tidak mengeksploitasi air melebihi daya pemulihan dan pengisiannya kembali.

Selanjutnya, kegiatan pembangunan tidak dapat terlepas dari aspek sosial kemasyarakatan, yang menempatkan masyarakat sebagai subyek pembangunan itu sendiri. Keberlanjutan pembangunan akan juga tergantung pada pelaku pembangunan atau pemangku kepentingan dalam pembangunan. Pembangunan yang ada harus dapat memberikan manfaat sosial kepada masyarakat dan juga dapat melibatkan semua pelaku kepentingan demi menjamin keberlanjutannya. Untuk itu, pembangunan harus memperhatikan aspek sosial agar dapat berlangsung secara berkelanjutan. Aspek sosial penting dalam pembangunan berkelanjutan, antara lain adalah bahwa pembangunan harus memperhatikan: partisipasi masyarakat pelaku, partisipasi masyarakat marjinal/minoritas (kaum miskin dan perempuan), struktur sosial masyarakat, serta tatanan atau nilai sosial yang berkembang dalam masyarakat.

Pertimbangan utama dalam pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan dalam aspek sosial adalah: (1) **struktur sosial masyarakat**: kegiatan pembangunan yang direncanakan diupayakan mempertimbangkan struktur sosial masyarakat agar tidak terjadi konflik dan benturan nilai yang tidak diinginkan dan (2) **partisipasi masyarakat pelaku dan marjinal/minoritas**: kegiatan pembangunan yang

direncanakan telah memasukkan unsur partisipasi masyarakat/pemangku kepentingan dan masyarakat marjinal terutama dalam proses pengambilan keputusan serta peran-peran lainnya.

Berkaitan dengan itu, pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan mempunyai indikator kinerja yang mencerminkan 3 pilar pembangunan yaitu: (1) ekonomi: indikator ekonomi makro seperti pertumbuhan ekonomi, dan dampak ekonomi; (2) sosial: tingkat partisipasi masyarakat pelaku pembangunan, partisipasi masyarakat marginal/minoritas (kaum miskin dan perempuan), dampak terhadap struktur sosial masyarakat, serta tatanan atau nilai sosial yang berkembang di masyarakat; dan (3) lingkungan hidup: dampak terhadap kualitas air, udara dan lahan serta ekosistem (keanekaragaman hayati).

Dalam rangka mencapai sasaran pembangunan nasional, khususnya untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, instansi pemerintah (kementerian/lembaga) terkait harus mengembangkan kebijakan di lingkungannya masing-masing dengan indikator pengarusutamaan, sebagaimana tabel di bawah ini.

TABEL 1.1
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGARUSUTAMAAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (LINGKUNGAN HIDUP) MELALUI KEBIJAKAN KEMENTERIAN/ LEMBAGA BESERTA INDIKATORNYA

No.	ISU/KEBIJAKAN NASIONAL	INDIKATOR	SASARAN 2014
ASPEK LINGKUNGAN HIDUP:			
1. Peningkatan Daya Dukung dan Daya Tampung Sumber Daya Lahan			
1.1	Pemeliharaan Daya Serap Lahan terhadap Air: Penerapan analisis daya serap lahan terhadap air dalam program pembangunan sektor	% Kegiatan/Program yang mempertahankan daya serap lahan terhadap air	60-80%
1.2	Pemeliharaan Kualitas Lahan (struktur dan materi): Penerapan analisis dampak kegiatan/program terhadap kualitas lahan	% kegiatan/program yang mempertahankan kualitas lahan	60-80%
1.3	Pemeliharaan Luas Areal Tutupan	% kegiatan/program yang	60-80%

No.	ISU/KEBIJAKAN NASIONAL	INDIKATOR	SASARAN 2014
	Lahan Perhitungan tutupan lahan dalam setiap kegiatan/program pembangunan sektor	mempertahankan luas areal tutupan lahan hijau	
1.4	Pencegahan meningkatnya laju erosi lahan: Penerapan sistem pengendalian dan rekayasa lingkungan untuk menahan meningkatnya laju erosi lahan.	% kegiatan/program yang tidak mengakibatkan meningkatnya laju erosi lahan	60-80%
2. Peningkatan Daya Dukung dan Daya Tampung Sumber Daya Air			
2.1	Pemeliharaan Kualitas Air: Penerapan Standar baku Mutu Kualitas Air	% kegiatan/program yang tidak memberikan dampak terhadap kualitas air setempat	60-80%
2.2	Pemeliharaan Kuantitas Air (penggunaan dengan mempertimbangkan daya pengisian kembali): Penerapan analisis dampak kegiatan/program terhadap kuantitas air setempat	% kegiatan/program yang tidak mempengaruhi jumlah air yang tersedia sesuai dengan daya dukung dan kebutuhan masyarakat setempat	60-80%
3. Peningkatan Kualitas Udara			
3.1	Pemeliharaan Kualitas Udara: Penerapan Standar baku Mutu Kualitas Udara	% kegiatan/program yang tidak memberikan dampak terhadap kualitas udara setempat	60-80%
ASPEK SOSIAL			
1.1	Pelestarian struktur dan nilai-nilai masyarakat:	%kegiatan/program yang tidak menimbulkan konflik	80%



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

No.	ISU/KEBIJAKAN NASIONAL	INDIKATOR	SASARAN 2014
	Penerapan pertimbangan struktur dan nilai sosial kemasyarakatan dalam kegiatan/program pembangunan	atau benturan sosial	
1.2	Peningkatan keterlibatan masyarakat terutama masyarakat marjinal (miskin, perempuan, pemuda dan anak-anak) : Penerapan metode partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan/program pembangunan	%kegiatan/program yang menerapkan metode partisipatif (public hearing, musyawarah dengan pemangku kepentingan dsb) dalam pelaksanaannya	60-80%
ASPEK EKONOMI			
1.1	Peningkatan pertumbuhan ekonomi: Pertimbangan pertumbuhan ekonomi dan efisiensi ekonomi	%kegiatan/program yang mendorong pertumbuhan ekonomi (spin-off/domino efek)	90%
1.2	Pengentasan kemiskinan dan ketimpangan sosial: Penerapan pertimbangan pengentasan kemiskinan dan ketimpangan sosial dalam kegiatan/program pembangunan	%kegiatan/program yang mendorong pengentasan kemiskinan dan ketimpangan sosial	80%

I.1.2 Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Tata kelola pemerintahan yang baik merupakan tatanan pengelolaan manajemen yang ditandai dengan penerapan prinsip-prinsip tertentu, antara lain: keterbukaan, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, supremasi hukum, keadilan, dan partisipasi. Penerapan tatakelola pemerintahan yang baik secara konsisten dan berkelanjutan oleh sebuah negara mempunyai peranan yang sangat penting bagi tercapainya sasaran pembangunan nasional, dan dapat menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapi secara efektif dan efisien. Terbangunnya tata kelola pemerintahan yang baik dalam

manajemen pemerintahan akan tercermin dari berkurangnya tingkat korupsi, makin banyaknya keberhasilan pembangunan di berbagai bidang, dan terbentuknya birokrasi pemerintahan yang professional dan berkinerja tinggi. Oleh karena itu, guna mewujudkan visi pembangunan nasional berupa kesejahteraan, masyarakat, demokrasi, dan keadilan, tata kelola pemerintahan yang baik dalam manajemen pemerintahan harus dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan. Penerapan tata kelola pemerintah yang baik tersebut harus dilakukan pada seluruh aspek manajemen penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pengendaliannya.

Penerapan tatakelola pemerintahan yang baik diharapkan terwujud dalam pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, pelayanan publik yang berkualitas, dan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi yang tinggi. Ketiganya merupakan prasyarat keberhasilan pembangunan. Tanpa pemerintahan yang bersih akan sulit dicapai pengelolaan sumber daya pembangunan secara akuntabel, yang akan berakibat langsung pada menurunnya kualitas pelayanan publik, serta menghilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Melalui penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, keadilan dan kepentingan masyarakat luas dapat dijaga, martabat dan integritas bangsa di mata dunia ditingkatkan, dan akhirnya makin meningkatkan kepercayaan rakyat terhadap penyelenggara pemerintahan dan pembangunan. Pelayanan publik juga merupakan hal yang penting karena kewajiban utama pemerintah di setiap negara adalah memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakatnya agar dapat hidup lebih aman, nyaman dan sejahtera. Kewajiban ini harus dipenuhi oleh pemerintah karena rakyat, sebagai pemegang kedaulatan, telah menguasai kewenangannya kepada pemerintah untuk menguasai dan mengolah sumber daya pembangunan. Berbagai bentuk pelayanan publik diperlukan oleh masyarakat untuk memenuhi hajat hidupnya sehari-hari, untuk meningkatkan kesejahteraannya, dan untuk mengekspresikan dirinya secara maksimal. Pelayanan publik yang baik juga memfasilitasi dunia usaha nasional, sehingga dapat ikut memacu peningkatan kapasitas perekonomian nasional. Hal itu semua hanya dapat dicapai dengan adanya kinerja birokrasi yang efektif. Birokrasi yang efektif bertujuan untuk memastikan tercapainya tujuan utama dari kebijakan publik dan pembangunan nasional, yaitu kesejahteraan masyarakat yang demokratis dan berkeadilan. Birokrasi yang efisien bertujuan untuk mengurangi pemborosan sumber-sumber daya negara dan agar sumber-sumber daya negara dimanfaatkan secara optimal dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan nasional. Sementara itu, birokrasi yang akuntabel memastikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional dapat dipertanggungjawabkan dari sisi akuntabilitas kerjanya kepada publik secara luas.

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, pelayanan publik yang berkualitas, serta kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi yang tinggi, telah ditetapkan berbagai kebijakan nasional. Di dalam RPJMN 2010-2014 ini beberapa kebijakan nasional baru akan ditetapkan dan kebijakan lainnya yang telah ada akan



disempurnakan. Agar kebijakan nasional itu dapat mencapai sasaran yang diharapkan, kebijakan nasional tersebut perlu dijabarkan oleh kebijakan yang lebih operasional di tingkat kementerian/lembaga. Untuk itu, ditetapkan indikator pengarusutamaan tata kelola pemerintahan yang perlu diterapkan di tingkat kementerian/lembaga seperti disajikan dalam Tabel 1.2.

TABEL 1.2
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGARUSUTAMAAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN
YANG BAIK MELALUI KEBIJAKAN KEMENTERIAN/ LEMBAGA BESERTA
INDIKATORNYA

No.	Isu/Kebijakan Nasional	Kebijakan instansi	Indikator di setiap instansi	Sasaran 2014
1. Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN				
1.1	Penegakan disiplin PNS di seluruh instansi pemerintah	Penegakan peraturan mengenai disiplin PNS	- Tersedianya sistem penegakan disiplin yang efektif - % Pelanggaran disiplin mendapatkan sanksi	100%
1.2	Penerapan pakta integritas bagi pejabat pemerintah	Penerapan pakta integritas bagi pejabat Eselon I, II, dan III	% pejabat telah menandatangani dan melaksanakan pakta integritas	100%
1.3	Kepatuhan penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)	Mewajibkan pejabat untuk melaporkan LHKPN	% pejabat yang telah melaporkan LHKPN	100%
1.4	Kebijakan antikorupsi	Mewajibkan pelaporan gratifikasi	Tersedianya sistem pelaporan gratifikasi	100%
1.5	Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)	Penerapan sistem pengendalian internal yang efektif	Tersedia dan terlaksananya sistem pengendalian internal yang efektif	100%
1.6	Pengembangan Sistem e-Procurement	Penerapan e-procurement dalam pengadaan barang dan	% pengadaan menggunakan e-procurement	75%



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

No.	Isu/Kebijakan Nasional	Kebijakan instansi	Indikator di setiap instansi	Sasaran 2014
	Nasional	jasa		
1.7	Tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK	Peningkatan tindak lanjut atas temuan hasil pemeriksaan	% temuan yang ditindaklanjuti	100%
1.8	Akuntabilitas pengelolaan keuangan Negara	Peningkatan akuntabilitas pengelolaan anggaran dan pelaporannya	Opini BPK atas LK K/L	WTP
1.9	Pengaduan masyarakat	Tindaklanjut pengaduan masyarakat	<ul style="list-style-type: none">- Tersedianya sistem pengaduan masyarakat yang efektif- % Penyelesaian tindak lanjut atas pengaduan yang disampaikan masyarakat	100%
2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik				
2.1	Penerapan Standar Pelayanan pada Unit Penyelenggara Pelayanan Publik	Penerapan Standar Pelayanan Publik untuk seluruh unit penyelenggara pelayanan publik	% unit penyelenggara pelayanan publik yang sudah menerapkan Standar Pelayanan	100%
2.2	Penerapan Maklumat Pelayanan pada unit pelayanan publik	Menerapkan maklumat pelayanan untuk unit pelayanan publik	% unit pelayanan publik yang sudah menerapkan maklumat pelayanan	100%
2.3	Penerapan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk	Penerapan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Pemerintah Daerah menerapkan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (OSS)	100%

No.	Isu/Kebijakan Nasional	Kebijakan instansi	Indikator di setiap instansi	Sasaran 2014
	elayanan utama dan investasi			
2.4	Penerapan Manajemen Pengaduan	Penerapan manajemen pengaduan yang efektif pada unit penyelenggara pelayanan publik	% unit pelayanan publik yang menerapkan manajemen pengaduan yang efektif	100%
2.5	Percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik	Menyusun rencana percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik dan melaksanakannya sesuai batas waktu yang ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang pelayanan publik	<ul style="list-style-type: none"> - Tersusunnya rencana peningkatan kualitas pelayanan publik pada unit penyelenggara pelayanan publik - Terlaksananya rencana peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai batas waktu yang ditetapkan 	100%
2.6	Pelaksanaan evaluasi dan penilaian terhadap kinerja pelayanan publik	Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja kepada unit penyelenggara pelayanan publik yang ada	<ul style="list-style-type: none"> - Tersedianya sistem evaluasi kinerja pelayanan publik - % Unit Penyelenggara Pelayanan Publik yang mendapat penilaian baik 	100% 90%
3. Peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi				
3.1	Penataan kelembagaan instansi pemerintah	Melakukan restrukturisasi organisasi dan tata kerja instansi untuk rightsizing di dasarkan visi, misi, strategi dan analisis obyektif, serta	% Tersusunnya struktur kelembagaan (organisasi dan tata kerja) yang proporsional, efektif, efisien	100%



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

No.	Isu/Kebijakan Nasional	Kebijakan instansi	Indikator di setiap instansi	Sasaran 2014
		tupoksi.		
3.2	Penataan ketatalaksanaan instansi pemerintah	Penyederhanaan proses bisnis dan penyusunan SOP utama	% SOP utama telah tersusun sesuai dengan proses bisnis yang lebih sederhana	100%
3.3	Pemantapan kualitas manajemen SDM	Penerapan manajemen SDM yang berkualitas (transparan dan berbasis merit/kompetensi)	<ul style="list-style-type: none">- Tersedianya sistem rekrutmen yang transparan- Tersedianya sistem penilaian kinerja yang terukur- Tersedianya sistem promosi dan mutasi yang terbuka dan transparan- Tersedianya sistem diklat berbasis merit dan kompetensi- Tersedianya sistem penegakan kode etik yang efektif, disertai penerapan <i>reward and punishment</i>	100%
3.4	Pengembangan dan penerapan <i>e-Government</i>	Pengembangan dan penerapan <i>e-Government</i>	Tersusunnya rencana penerapan <i>e-Government</i> yang konkrit dan terukur	100%
3.5	Sistem kearsipan dan dokumentasi berbasis TIK	Penerapan manajemen kearsipan dan dokumentasi berbasis TIK	Manajemen kearsipan dan dokumentasi sudah dilaksanakan dengan sistem berbasis TIK	100%
3.6	Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Aparatur	Penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	% penerapan SAKIP (renstra, penilaian kinerja, kontrak kinerja, pengendalian, dan lain-lain)	100%

1.1.3 Pengarusutamaan Gender

Pengarusutamaan gender dalam pembangunan adalah strategi yang digunakan untuk mengurangi kesenjangan antara penduduk laki-laki dan perempuan Indonesia dalam mengakses dan mendapatkan manfaat pembangunan, serta meningkatkan partisipasi dan mengontrol proses pembangunan. Pengarusutamaan gender (PUG) dilakukan dengan mengintegrasikan perspektif (sudut pandang) gender ke dalam proses pembangunan di setiap bidang. Penerapan pengarusutamaan gender akan menghasilkan kebijakan publik yang lebih efektif untuk mewujudkan pembangunan yang lebih adil dan merata bagi seluruh penduduk Indonesia, baik laki-laki maupun perempuan. Piranti analisis yang dapat digunakan untuk strategi pengarusutamaan gender antara lain adalah 'Alur Kerja Analisis Gender' (*Gender Analysis Pathway* – GAP). Hasil analisis gender ini kemudian digunakan untuk melakukan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender. Dengan demikian, diharapkan bahwa pengintegrasian gender ke dalam siklus perencanaan dan penganggaran di tingkat pusat dan daerah akan membuat pengalokasian sumber daya pembangunan menjadi lebih efektif, akuntabel, dan adil dalam memberikan manfaat kepada perempuan dan laki-laki.

Permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender dalam pembangunan adalah sebagai berikut. **Pertama, meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan.** Rendahnya kualitas hidup dan peran perempuan, antara lain, disebabkan oleh: (1) terjadinya kesenjangan gender dalam hal akses, manfaat, dan partisipasi dalam pembangunan, serta penguasaan terhadap sumber daya, terutama di tatanan antarprovinsi dan antarkabupaten/kota; (2) rendahnya peran dan partisipasi perempuan di bidang politik, jabatan-jabatan publik, dan di bidang ekonomi; dan (3) rendahnya kesiapan perempuan dalam mengantisipasi dampak perubahan iklim, krisis energi, krisis ekonomi, bencana alam dan konflik sosial, serta terjadinya penyakit. Hal ini, antara lain, ditunjukkan dengan rendahnya peningkatan nilai IDG setiap tahunnya yang mengindikasikan bahwa peningkatan kesetaraan gender di bidang ekonomi dan ketenagakerjaan, politik, serta pengambilan keputusan belum signifikan.

Pada lembaga yudikatif, data tahun 2004 menunjukkan bahwa dari hakim yang ada, baru terdapat 20 persen hakim perempuan, dengan 18 persen di antaranya sebagai hakim agung; sementara jumlah jaksa perempuan adalah 27 persen. Walaupun terjadi peningkatan partisipasi perempuan yang menduduki jabatan eselon I-IV di lembaga eksekutif, namun jabatan yang diduduki perempuan masih berpusat pada eselon IV. Dari uraian tersebut terlihat bahwa posisi, komposisi, serta peran perempuan di lembaga yudikatif dan eksekutif masih relatif kecil. Di samping itu, marginalisasi perempuan di sektor informal merupakan masalah yang masih harus dihadapi, mengingat bahwa sektor informal ini menyerap tenaga kerja perempuan yang terbesar, dan telah terbukti menjadi 'sabuk pengaman' perekonomian keluarga. Dengan demikian, *tantangan pertama yang harus dihadapi adalah meningkatkan pemahaman para pemangku kepentingan terkait dengan pentingnya pembangunan yang responsif gender.*



Kedua, meningkatkan perlindungan bagi perempuan terhadap berbagai tindak kekerasan. Hal ini terlihat dari masih belum memadainya jumlah dan kualitas tempat pelayanan bagi perempuan korban kekerasan karena banyaknya jumlah korban yang harus dilayani dan luasnya cakupan wilayah yang harus dijangkau. Data Susenas 2006 menunjukkan bahwa prevalensi kekerasan terhadap perempuan sebesar 3,1 persen atau sekitar 3-4 juta perempuan mengalami kekerasan setiap tahun. Namun, hingga saat ini, pusat krisis terpadu (PKT) untuk penanggulangan kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan perdagangan perempuan hanya tersedia di 3 provinsi dan 5 kabupaten. Di samping itu, masih terdapat ketidaksesuaian antarproduk hukum yang dihasilkan, termasuk antara produk hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat dengan daerah, sehingga perlindungan terhadap perempuan belum dapat terlaksana secara komprehensif. Oleh sebab itu, *tantangan kedua yang harus dihadapi ke depan adalah meningkatkan koordinasi pelaksanaan dan harmonisasi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perlindungan bagi perempuan terhadap berbagai tindak kekerasan dan diskriminasi.*

Ketiga, meningkatkan kapasitas kelembagaan PUG dan pemberdayaan perempuan. Permasalahan yang muncul dalam meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan serta perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan, antara lain, disebabkan oleh belum efektifnya kelembagaan PUG dan pemberdayaan perempuan yang terlihat dari: (1) belum optimalnya penerapan peranti hukum, peranti analisis, dan dukungan politik terhadap kesetaraan gender sebagai prioritas pembangunan; (2) belum memadainya kapasitas kelembagaan dalam pelaksanaan PUG, terutama sumber daya manusia, serta ketersediaan dan penggunaan data terpilah menurut jenis kelamin dalam siklus pembangunan; dan (3) masih rendahnya pemahaman mengenai konsep dan isu gender serta manfaat PUG dalam pembangunan, terutama di kabupaten/kota. Untuk itu, *tantangan yang harus dihadapi adalah meningkatkan kapasitas kelembagaan PUG dan pemberdayaan perempuan, serta koordinasi pelaksanaannya.*

Sasaran pengarusutamaan gender adalah meningkatnya kesetaraan gender, yang ditandai dengan: (a) meningkatnya kualitas hidup dan peran perempuan terutama di bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi termasuk akses terhadap penguasaan sumber daya, dan politik; (b) meningkatnya persentase cakupan perempuan korban kekerasan yang mendapat penanganan pengaduan; dan (c) meningkatnya efektivitas kelembagaan PUG dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan dan program pembangunan yang responsif gender di tingkat nasional dan daerah.

Berdasarkan permasalahan, tantangan dan sasaran sebagaimana tersebut di atas, maka pengarusutamaan gender dilakukan melalui tiga isu nasional. *Pertama*, peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan dalam pembangunan, melalui harmonisasi peraturan perundangan dan pelaksanaannya di semua tingkat pemerintahan, dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan. *Kedua*, perlindungan perempuan terhadap berbagai tindak kekerasan, melalui upaya-upaya pencegahan,

pelayanan, dan pemberdayaan. *Ketiga*, peningkatan kapasitas kelembagaan PUG dan pemberdayaan perempuan.

Keberhasilan peningkatan kesetaraan gender ini dapat diukur dengan Indeks Pembangunan Gender (IPG) (*Gender-related Development Index/GDI*), yang merupakan indikator komposit yang diukur melalui angka harapan hidup sejak lahir, angka melek huruf, dan gabungan angka partisipasi sekolah dasar, menengah, tinggi, serta Pendapatan Domestik Bruto (PDB) per kapita dengan paritas daya beli (*purchasing power parity*), dan dihitung berdasarkan jenis kelamin. Di samping itu, kemajuan pembangunan gender juga ditunjukkan dengan indikator *Gender Empowerment Measurement* (GEM) atau Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), yang diukur melalui partisipasi perempuan di bidang ekonomi, politik, dan pengambilan keputusan.

TABEL 1.3
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGARUSUTAMAAN GENDER MELALUI
KEBIJAKAN KEMENTERIAN/LEMBAGA BESERTA INDIKATORNYA

No	ISU / KEBIJAKAN NASIONAL	INDIKATOR	SASARAN
1. Peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan dalam pembangunan			
1.1	Penyediaan Layanan Pendidikan TK ¹⁾	Rasio APK peserta didik TK/TKLB perempuan:laki-laki	Tercapainya keluasan dan pemerataan akses TK bermutu dan berkesetaraan gender di semua kabupaten dan kota
1.2	Penjaminan Kepastian Layanan Pendidikan SD ¹⁾	Rasio APM peserta didik perempuan/laki-laki pada SD/SDLB	Tercapainya keluasan dan pemerataan akses SD bermutu dan berkesetaraan gender di semua kabupaten dan kota
1.3	Peningkatan Akses dan Mutu Madrasah Ibtidaiyah ¹⁾	Rasio APM peserta didik perempuan:laki laki pada MI	Meningkatnya APM MI
1.4	Penjaminan Kepastian Pendidikan SMP/SMPLB ¹⁾	Rasio APM peserta didik perempuan/laki-laki pada SMP/SMPLB	Tercapainya keluasan dan pemerataan akses SMP bermutu dan berkesetaraan gender di semua kabupaten dan kota
1.5	Peningkatan Akses dan Mutu Madrasah Tsanawiyah ¹⁾	Rasio APM peserta didik perempuan:laki laki pada MTs	Meningkatnya APM MTs
1.6	Penyediaan dan Peningkatan Pendidikan SMA/SMLB ¹⁾	Rasio APK peserta didik perempuan/laki-laki pada SMA/SMK/SMLB	Tercapainya perluasan dan pemerataan akses pendidikan SMA bermutu, berkesetaraan gender, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat, di semua kabupaten dan kota
1.7	Peningkatan Akses dan Mutu Madrasah Aliyah ¹⁾	Rasio APK peserta didik perempuan:laki laki pada MA	Meningkatnya APK MA



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

No	ISU / KEBIJAKAN NASIONAL	INDIKATOR	SASARAN
1.8	Penyediaan Layanan Akademik Program Studi ¹⁾	Rasio APK peserta didik perempuan/laki-laki pada PT	Tersedianya prodi yang bermutu, berdaya saing internasional, dan relevan
1.9	Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan Tinggi Islam ¹⁾	Rasio APK peserta didik perempuan:laki laki pada PTA	Meningkatnya APK PTA
1.10	Penyediaan Layanan Pendidikan Kesetaraan ¹⁾	Rasio jumlah peserta didik orang dewasa laki-laki:perempuan menurut kabupaten/kota	Terciptanya perluasan dan pemerataan akses pendidikan kesetaraan paket A, paket B, Paket C dan bagi orang Dewasa bermutu, berkesetaraan gender dan relevan dengan kebutuhan masyarakat di semua kabupaten/kota untuk bekerja pada dunia usaha dan dunia industri terkait dan atau usaha mandiri (wirausaha)
1.11	Penyediaan Layanan Pendidikan Masyarakat ¹⁾	Disparitas gender penduduk berkeaksaraan usia ≥ 15 tahun	Meningkatnya tingkat literasi yang berkesetaraan gender di Kabupaten dan Kota
1.12	Penyediaan Guru untuk Seluruh Jenjang Pendidikan ¹⁾	Rasio guru perempuan:laki-laki yang bersertifikat pendidik	Tersedianya Guru PAUD, SD/SDLB, SMP/SMPLB, dan SMA/SMK/ SMLB yang Bermutu yang merata antar Provinsi, Kabupaten dan Kota
1.13	Peningkatan Mutu dan Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Madrasah ¹⁾	Rasio guru perempuan:laki-laki yang bersertifikat pendidik	1. Terlaksananya Sertifikasi Guru 2. Rasio guru perempuan – laki-laki yang bersertifikat pendidik
1.14	Pembinaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Reproduksi ¹⁾	1. Persentase ibu bersalin yang ditolong oleh nakes terlatih (cakupan PN) 2. Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal (cakupan K4)	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan ibu dan Reproduksi
1.15	Pembinaan Keperawatan dan Kebidanan ¹⁾	Jumlah Puskesmas yang menerapkan pelayanan kebidanan sesuai standar dan pedoman	Meningkatnya pembinaan keperawatan dan kebidanan
1.16	Penyehatan Lingkungan ¹⁾	Persentase penduduk yang memiliki akses terhadap air minum berkualitas	Meningkatnya penyehatan dan pengawasan kualitas lingkungan
1.17	Penanggulangan Krisis Kesehatan ¹⁾	Jumlah kab/kota yang mempunyai kemampuan tanggap darurat dalam penanganan bencana	Meningkatnya penanggulangan krisis secara cepat
1.18	Pengembangan kebijakan dan pembinaan kesertaan ber-KB ¹⁾	1. Persentase komplikasi berat yang dilayani 2. Persentase kegagalan KB yang dilayani	Meningkatnya pembinaan, kesertaan, dan kemandirian ber-KB melalui 23.500 klinik KB pemerintah dan swasta
1.19	Penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja (PKBR) ¹⁾	Persentase pengetahuan remaja tentang : a. Kesehatan reproduksi remaja b. HIV/AIDS	Meningkatnya PSP remaja tentang PKBR

No	ISU / KEBIJAKAN NASIONAL	INDIKATOR	SASARAN
		c. Perencanaan kehidupan berkeluarga	
1.20	Pembinaan ketahanan keluarga ¹⁾	Jumlah kebijakan kegiatan pembinaan ketahanan keluarga	<ol style="list-style-type: none"> Meningkatnya ketahanan keluarga dalam rangka peningkatan kesertaan, pembinaan, dan kemandirian ber-KB bagi PUS anggota poktan Meningkatnya ketrampilan keluarga dalam pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak, pembinaan remaja, serta peningkatan kualitas hidup lansia
1.21	Peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi pengendalian penduduk dan KB ¹⁾	Persentase PUS, WUS, dan remaja yang mengetahui informasi Kependudukan dan KB melalui media massa (cetak dan elektronik) dan media luar ruang	Meningkatnya pengetahuan, sikap, dan perilaku masyarakat tentang pengendalian penduduk dan KB
1.22	Pelayanan Sosial Lanjut Usia ¹⁾	Jumlah lanjut usia terlantar yang berhasil dilayani, dilindungi dan direhabilitasi baik di dalam maupun di luar panti (jiwa)	Terlaksananya pelayanan, perlindungan dan rehabilitasi sosial bagi lanjut usia terlantar.
1.23	Bantuan Sosial Korban Bencana Alam ¹⁾	Jumlah korban bencana alam yang berhasil dibantu dan dilayani (jiwa)	Terpenuhinya kebutuhan darurat dan pelayanan sosial bagi korban bencana alam.
1.24	Bantuan Sosial Korban Bencana Sosial ¹⁾	Jumlah korban bencana sosial yang berhasil dibantu dan dilayani (jiwa)	Terpenuhinya kebutuhan darurat dan pelayanan sosial bagi korban bencana sosial.
1.25	Pedoman, petunjuk teknis dan bimbingan teknis/supervisi/publikasi/sosialisasi penyelenggaraan pemilu dan pendidikan pemilih ³⁾	<ol style="list-style-type: none"> Jumlah modul pendidikan pemilih untuk kelompok perempuan, miskin, cacat, pemilih pemula, lansia Jumlah kegiatan pendidikan pemilih bagi caleg perempuan Jumlah kader parpol perempuan yang mendapatkan pendidikan politik 	Terseleenggaranya bimbingan teknis/supervisi/publikasi/sosialisasi penyelenggaraan pemilu dan pendidikan pemilih
1.26	Pengembangan Nilai-nilai Kebangsaan ³⁾	Jumlah forum sosialisasi pengembangan nilai kebangsaan untuk pemuda, perempuan, aparatur pemerintah	Terlaksananya penyusunan kebijakan, dukungan dan fasilitasi pengembangan nilai-nilai kebangsaan
1.27	Pembinaan dan Pengembangan Budaya Politik ³⁾	Jumlah materi/modul pendidikan politik bagi calon pemilih pemula	Terlaksananya penyusunan kebijakan, dukungan dan fasilitasi pengembangan budaya politik yang berdasarkan pada 4 pilar negara (Pancasila, UUD NRI 1945, Bhineka Tunggal Ika, dan NKRI)
1.28	Fasilitasi Lembaga Perwakilan dan Partisipasi Politik ³⁾	Jumlah paket kerjasama dengan organisasi masyarakat sipil dalam peningkatan partisipasi politik	Terlaksananya penyusunan kebijakan, dukungan dan fasilitasi lembaga perwakilan dan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

No	ISU / KEBIJAKAN NASIONAL	INDIKATOR	SASARAN
		perempuan	partisipasi politik
1.29	Pembinaan Penyelenggaraan Kegiatan di bidang Kesehatan dan Perawatan warga binaan pemasyarakatan ⁴⁾	Persentase bayi, ibu hamil, ibu menyusui dan kelompok resiko tinggi yang memperoleh perlindungan secara tepat waktu dan akuntabel	Penyelenggaraan kegiatan di bidang kesehatan dan perawatan yang berkualitas
2. Perlindungan Perempuan terhadap Berbagai Tindak Kekerasan			
2.1	Penyusunan dan harmonisasi kebijakan perlindungan perempuan dari tindak kekerasan ¹⁾	Persentase cakupan perempuan korban kekerasan yang mendapat penanganan pengaduan	Meningkatnya jumlah kebijakan perlindungan perempuan dari tindak kekerasan
2.2	Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri di Kawasan Asia Timur dan Pasifik ³⁾	Tingkat penanganan isu <i>illegal migrant</i> dan <i>human trafficking</i> serta isu-isu lainnya	Terlaksananya peran Indonesia dalam kerjasama di bidang politik, keamanan, ekonomi, dan sosial budaya dengan negara-negara di kawasan Asia Timur dan Pasifik
2.3	Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri di Kawasan Asia Selatan dan Tengah ³⁾	Tingkat penanganan isu <i>illegal migrant</i> dan <i>human trafficking</i> serta isu-isu lainnya	Terlaksananya peran Indonesia dalam kerjasama di bidang politik, keamanan, ekonomi, dan sosial budaya dengan negara-negara di kawasan Asia Selatan dan Tengah
2.4	Peningkatan perlindungan dan pelayanan WNI/BHI di Luar Negeri ³⁾	Prosentase pemberian bantuan hukum (advokasi dan lawyer) bagi WNI terutama tenaga kerja wanita	Terlaksananya pelayanan dan perlindungan WNI/BHI
2.5	Peningkatan Perlindungan Pekerja Perempuan dan Penghapusan Pekerja Anak ²⁾	<ol style="list-style-type: none"> Persentase perusahaan yang memenuhi norma kerja perempuan dan anak Tersedianya kebijakan dalam upaya perlindungan pekerja perempuan dan anak Jumlah pengawas ketenagakerjaan dalam pengawasan norma kerja perempuan dan anak yang ditingkatkan kapasitasnya 	<ol style="list-style-type: none"> Memfasilitasi pekerja anak untuk kembali ke dunia pendidikan atau memperoleh pelatihan keterampilan Berkurangnya jumlah anak yang bekerja pada bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak Meningkatnya perlindungan kepada pekerja perempuan
2.6	Pembinaan Penempatan dan Perlindungan TKI Luar Negeri ²⁾	<ol style="list-style-type: none"> Jumlah penyempurnaan peraturan penempatan dan perlindungan pekerja migran Jumlah fasilitasi kasus/ permasalahan Pekerja Migran di dalam dan luar negeri 	Tersedianya regulasi yang melindungi pekerja migran
2.7	Pencegahan dan Penanggulangan Segala Bentuk Kekerasan terhadap Perempuan dan Pemenuhan Hak Korban ⁴⁾	1. Tingkat pelibatan dan penyikapan aparat negara dalam upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan serta perlindungan, penegakan dan pemajuan HAM	Terlaksananya kegiatan pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan pemenuhan hak korban

No	ISU / KEBIJAKAN NASIONAL	INDIKATOR	SASARAN
		<p>perempuan</p> <p>2. Tingkat pelibatan dan penyikapan masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan serta perlindungan, penegakan dan pemajuan HAM perempuan</p> <p>3. Tingkat rekomendasi hasil pengkajian dan penelitian yang terkait dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan instrumen internasional yang relevan bagi perlindungan HAM perempuan</p> <p>4. Jumlah pemantauan termasuk pencarian fakta dan pendokumentasian pelanggaran HAM perempuan</p> <p>5. Prosentase pengaduan pelanggaran HAM perempuan yang ditindaklanjuti</p> <p>6. Prosentase pendampingan dan sistem pemulihan korban pelanggaran HAM yang dikembangkan</p> <p>7. Meningkatnya fungsi kelembagaan Komnas Perempuan dalam rangka menciptakan lembaga yang independen, transparan, dan akuntabel dalam menjalankan mandat Komnas Perempuan</p>	
3. Peningkatan kapasitas kelembagaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan			
3.1	Penyediaan Data Pendidikan untuk Perumusan Kebijakan Nasional ¹⁾	<p>1. Persentase penduduk melek huruf usia ≥ 15 tahun yang jumlah datanya teremajakan dalam Pangkalan Data dan Informasi Pendidikan berbasis Web (PadatiWeb) dirinci berdasarkan jenis kelamin dan jenis keaksaraan yang dikuasai per kabupaten/kota</p> <p>2. Persentase data pelaksana program pengarusutamaan gender yang jumlah datanya teremajakan (<i>up to date</i>) dalam padati-web dirinci menurut kabupten/kota</p>	Tersedianya Data PAUD, DIKDAS, DIKMEN dan Pendidikan Orang Dewasa
3.2	Penyusunan dan harmonisasi kebijakan bidang pendidikan yang	1. Jumlah kebijakan pelaksanaan PUG dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan	Meningkatnya jumlah kebijakan pelaksanaan PUG bidang pendidikan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

No	ISU / KEBIJAKAN NASIONAL	INDIKATOR	SASARAN
	responsif gender ¹⁾	2. Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi dalam penerapan ARG di bidang pendidikan 3. Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi dalam penyusunan data terpilah di bidang pendidikan	
3.3	Penyusunan dan harmonisasi kebijakan bidang kesehatan yang responsif gender ¹⁾	1. Jumlah kebijakan pelaksanaan PUG di bidang kesehatan 2. Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi dalam penerapan ARG di bidang kesehatan 3. Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi dalam penyusunan data terpilah di bidang kesehatan	Meningkatnya jumlah kebijakan pelaksanaan PUG bidang kesehatan
3.4	Penyusunan dan harmonisasi kebijakan bidang sumber daya alam dan lingkungan yang responsif gender ¹⁾	1. Jumlah kebijakan pelaksanaan PUG di bidang sumber daya alam dan lingkungan 2. Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi dalam penerapan ARG di bidang sumber daya alam dan lingkungan 3. Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi dalam penyusunan data terpilah di bidang sumber daya alam dan lingkungan	Meningkatnya jumlah kebijakan pelaksanaan PUG bidang sumber daya alam dan lingkungan
3.5	Penyusunan dan harmonisasi kebijakan partisipasi perempuan di bidang politik dan pengambilan keputusan ¹⁾	1. Jumlah kebijakan pelaksanaan PUG di bidang politik dan pengambilan keputusan 2. Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi dalam penerapan ARG di bidang politik dan pengambilan keputusan 3. Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi dalam penyusunan data terpilah di bidang politik dan pengambilan keputusan	Meningkatnya jumlah kebijakan partisipasi perempuan di bidang politik dan pengambilan keputusan
3.6	Penyusunan dan harmonisasi kebijakan bidang hukum yang responsif gender ¹⁾	1. Jumlah kebijakan pelaksanaan PUG di bidang hukum 2. Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi dalam penerapan ARG di bidang hukum 3. Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi dalam penyusunan data terpilah di bidang hukum	Meningkatnya jumlah kebijakan pelaksanaan PUG di bidang hukum
3.7	Penyusunan dan harmonisasi kebijakan bidang ketenagakerjaan yang responsif gender ¹⁾	1. Jumlah kebijakan pelaksanaan PUG di bidang ketenagakerjaan 2. Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi dalam penerapan ARG di bidang ketenagakerjaan 3. Jumlah K/L dan pemda yang	Meningkatnya jumlah kebijakan pelaksanaan PUG bidang ketenagakerjaan

No	ISU / KEBIJAKAN NASIONAL	INDIKATOR	SASARAN
		difasilitasi dalam penyusunan data terpilah di bidang ketenagakerjaan	
3.8	Penyusunan dan harmonisasi kebijakan koperasi, usaha mikro dan kecil, industri, dan perdagangan yang responsif gender ¹⁾	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah kebijakan pelaksanaan PUG di bidang koperasi, usaha mikro dan kecil, industri, dan perdagangan 2. Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi dalam penerapan ARG di bidang koperasi, usaha mikro dan kecil, industri, dan perdagangan 3. Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi dalam penyusunan data terpilah di bidang koperasi, usaha mikro dan kecil, industri, dan perdagangan 	Meningkatnya jumlah kebijakan pelaksanaan PUG bidang koperasi, usaha mikro dan kecil, industri, dan perdagangan
3.9	Penyusunan dan harmonisasi kebijakan bidang pertanian, kehutanan, perikanan, kelautan, ketahanan pangan, dan agrobisnis yang responsif gender ¹⁾	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah kebijakan pelaksanaan PUG di bidang pertanian, kehutanan, perikanan, kelautan, ketahanan pangan, dan agrobisnis 2. Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi dalam penerapan ARG di bidang pertanian, kehutanan, perikanan, kelautan, ketahanan pangan, dan agrobisnis 3. Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi dalam penyusunan data terpilah di bidang pertanian, kehutanan, perikanan, kelautan, ketahanan pangan, dan agrobisnis 	Meningkatnya jumlah kebijakan pelaksanaan PUG bidang pertanian, kehutanan, perikanan, kelautan, ketahanan pangan, dan agrobisnis
3.10	Penyusunan dan harmonisasi kebijakan bidang IPTEK dan sumber daya ekonomi yang responsif gender ¹⁾	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah kebijakan pelaksanaan PUG di bidang IPTEK dan sumber daya ekonomi 2. Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi dalam penerapan ARG di bidang IPTEK dan sumber daya ekonomi 3. Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi dalam penyusunan data terpilah di bidang IPTEK dan sumber daya ekonomi 	Meningkatnya jumlah kebijakan pelaksanaan PUG bidang IPTEK dan sumber daya ekonomi
3.11	Penyusunan dan harmonisasi kebijakan bidang infrastruktur yang responsif gender ¹⁾	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah kebijakan pelaksanaan PUG di bidang infrastruktur 2. Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi dalam penerapan ARG di bidang infrastruktur 3. Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi dalam penyusunan data terpilah di bidang infrastruktur 	Meningkatnya jumlah kebijakan pelaksanaan PUG bidang infrastruktur
3.12	Penyusunan dan harmonisasi kebijakan perlindungan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah kebijakan perlindungan perempuan dari tindak kekerasan 2. Jumlah K/L dan pemda yang 	Meningkatnya jumlah kebijakan perlindungan perempuan dari tindak kekerasan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

No	ISU / KEBIJAKAN NASIONAL	INDIKATOR	SASARAN
	perempuan dari tindak kekerasan ¹⁾	difasilitasi dalam penerapan kebijakan perlindungan perempuan dari tindak kekerasan 3. Jumlah kompilasi data perlindungan perempuan dari tindak kekerasan 4. Persentase cakupan perempuan korban kekerasan yang mendapat penanganan pengaduan 5. Persentase cakupan anak korban kekerasan yang mendapat penanganan pengaduan	
3.13	Penyusunan dan harmonisasi kebijakan penyusunan data gender ¹⁾	1. Jumlah kebijakan penerapan sistem data gender 2. Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi dalam penerapan kebijakan pelaksanaan sistem data terpilah gender 3. Tersedianya sistem data gender	Meningkatnya jumlah kebijakan penerapan sistem data gender
3.14	Penyusunan dan harmonisasi kebijakan perlindungan masalah sosial perempuan ¹⁾	1. Jumlah kebijakan perlindungan masalah sosial perempuan 2. Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi dalam penerapan kebijakan perlindungan masalah sosial perempuan 3. Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi dalam penyusunan data perlindungan masalah sosial perempuan	Meningkatnya jumlah kebijakan perlindungan masalah sosial perempuan
3.15	Penyusunan dan harmonisasi kebijakan perlindungan tenaga kerja perempuan ¹⁾	1. Jumlah kebijakan perlindungan tenaga kerja perempuan 2. Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi dalam penerapan kebijakan perlindungan tenaga kerja perempuan 3. Jumlah kompilasi data perlindungan tenaga kerja perempuan	Meningkatnya jumlah kebijakan perlindungan tenaga kerja perempuan
3.16	Penyusunan dan harmonisasi kebijakan perlindungan korban perdagangan orang ¹⁾	1. Jumlah kebijakan perlindungan korban tindak pidana perdagangan orang 2. Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi dalam penerapan kebijakan perlindungan korban tindak pidana perdagangan orang 3. Jumlah kompilasi data perlindungan korban tindak	Meningkatnya jumlah kebijakan perlindungan korban tindak pidana perdagangan orang

No	ISU / KEBIJAKAN NASIONAL	INDIKATOR	SASARAN
		pidana perdagangan orang	
3.17	Sistem Informasi Manajemen ⁴⁾	Jumlah kegiatan pendataan perkara yang disajikan berdasarkan jenis penanganan perkara termasuk jenis perkara KDRT, perkara anak dan perkara lainnya	Tersedianya basis data yang dapat menyajikan informasi data perkara secara akurat, cepat dan lengkap dalam rangka mewujudkan penanganan perkara secara cepat dan akuntabel serta dapat diakses oleh masyarakat
3.18	Kegiatan Kerjasama HAM ⁴⁾	Jumlah harmonisasi rancangan peraturan perUUan dalam perspektif HAM	Peningkatan kerjasama dalam dan luar negeri dalam rangka pemajuan HAM dan harmonisasi rancangan peraturan perUUan dalam perspektif HAM serta NA instrumen HAM internasional
3.19	Kegiatan Perancangan Peraturan Perundang-undangan ⁴⁾	Jumlah Peraturan Perundang-undangan di bidang mekanisme Perlindungan Saksi dan Pelapor	Peningkatan kualitas RUU dan perat perundang-undangan di bawah UU di DPR serta tenaga fungsional Perancang PerUUan
3.20	Kegiatan Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan ⁴⁾	Jumlah Peraturan Perundang-undangan di bidang mekanisme Perlindungan Saksi dan Pelapor	Meningkatkan keharmonisan rancangan peraturan perundang-undangan tingkat pusat bidang politik, hukum, keamanan, keuangan, perbankan, industri, perdagangan, sumber daya alam, riset, teknologi, kesejahteraan rakyat yang harmonis

Keterangan:

¹⁾ Kegiatan ini tercantum pada Bab II (Bidang Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama)

²⁾ Kegiatan ini tercantum pada Bab III (Bidang Ekonomi)

³⁾ Kegiatan ini tercantum pada Bab VI (Bidang Politik)

⁴⁾ Kegiatan ini tercantum pada Bab VIII (Bidang Hukum dan Aparatur)

1.2. Kebijakan Lintas Bidang

1.2.1 Penanggulangan Kemiskinan

1.2.1.1 Kondisi Umum

Dalam sejarah pembangunan nasional, seluruh program dan upaya-upaya pembangunan ekonomi diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum, dan secara khusus mengupayakan penanggulangan kemiskinan. Dalam perkembangannya, penduduk miskin pada awal-awal pembangunan berencana lima tahunan menunjukkan penurunan yang cukup signifikan. Persentase penduduk miskin yang pada tahun 1976 mencapai sebesar 40 persen dari total penduduk Indonesia, dalam 20 tahun kemudian yaitu pada tahun 1996 menurun menjadi 11 persen. Hal ini



merupakan suatu perkembangan yang sangat menggembirakan. Sebagai akibat dari krisis ekonomi dan moneter yang terjadi pada tahun 1997, tingkat kemiskinan mengalami lonjakan. Untuk mengatasi lonjakan tingkat kemiskinan, Pemerintah menerapkan berbagai program yang ditujukan langsung untuk membantu keluarga miskin karena mereka merupakan kelompok masyarakat yang paling parah terkena krisis ekonomi dan moneter. Program khusus tersebut dikenal dengan Jaring Pengaman Sosial (JPS), yang masih terus dilaksanakan beberapa tahun setelah krisis. Pelaksanaan program yang bersifat "*targetted*" tersebut dirasakan mampu membantu masyarakat miskin mengatasi dampak krisis, terutama dalam menanggulangi dampak kekurangan pangan, putus sekolah, dan terhentinya pelayanan kesehatan. Program yang bersifat *targetted* inilah yang menjadi cikal bakal program perlindungan dan bantuan sosial seperti beras bersubsidi untuk rakyat miskin (Raskin), Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), dan beasiswa untuk siswa miskin dan Program Keluarga Harapan (PKH). Dengan pelaksanaan program-program tersebut secara berkesinambungan, dalam sepuluh tahun terakhir ini tingkat kemiskinan cenderung menurun kembali meskipun penurunannya belum setajam pada masa sebelum krisis tersebut.

Pada tahun 2009, jumlah penduduk miskin masih sebanyak 32,53 juta manusia atau 14,15 persen dari total penduduk. Selain itu, berbagai gejolak sosial ekonomi dan bencana telah meningkatkan kerentanan terhadap masyarakat pada umumnya dan masyarakat miskin pada khususnya. Sehubungan dengan itu, perjuangan untuk memerangi kemiskinan dan kerentanan masyarakat masih sangat berat. Untuk tahun 2010, tingkat kemiskinan diharapkan turun menjadi sebesar 12–13,5 persen. Untuk itu, perjuangan untuk terus menurunkan tingkat kemiskinan dan kerentanan masih harus dilakukan, apalagi dengan adanya berbagai tantangan baru dari dampak globalisasi dan berbagai bencana. Untuk mengatasi masalah kerentanan yang semakin meningkat, perlu dikembangkan sistem perlindungan sosial.

Yang dimaksud dengan Sistem Perlindungan Sosial adalah sebuah sistem yang terdiri dari berbagai perangkat yang melindungi individu, rumah tangga, atau masyarakat umum dari berbagai resiko yang muncul akibat guncangan ekonomi, dan memberikan bantuan bagi mereka yang rentan terhadap resiko tersebut. Sistem perlindungan sosial terdiri dari jaminan sosial dan bantuan sosial. Jaminan sosial adalah sebuah komponen perlindungan sosial yang berfungsi untuk melindungi seseorang, rumah tangga / kelompok orang dari kondisi tertentu, seperti lanjut usia, pengangguran, dan kecacatan/kecelakaan kerja. Penerima manfaat jaminan sosial pada umumnya memberikan kontribusi/iuran. Bantuan Sosial adalah sebuah komponen perlindungan sosial yang diberikan kepada mereka yang termasuk dalam kelompok rentan (*vulnerable*) atau mengalami kondisi tertentu seperti kemiskinan, lanjut usia, dan kecacatan. Penerima bantuan sosial tidak memberikan kontribusi/iuran. Dalam bab ini, yang dimaksud dengan bantuan sosial adalah Bantuan Sosial Berbasis Keluarga yang merupakan prioritas nasional sedangkan bantuan sosial yang berkaitan dengan pelayanan kesejahteraan sosial yang bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya

manusia (dan merupakan prioritas bidang) secara lebih jelas akan disajikan dalam Bab II, Pembangunan Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama. Sementara itu, penjelasan tentang jaminan sosial dapat dibaca dalam Bab III tentang Pembangunan Ekonomi.

RPJMN 2010-2014 merupakan rencana lima tahunan tahap kedua untuk mencapai target penurunan tingkat kemiskinan sebesar 5 persen pada akhir tahun 2025, yang merupakan akhir kurun waktu Pembangunan Jangka Panjang 2005-2025. Dengan tingkat kemiskinan yang masih seperti disebutkan di atas, berbagai upaya dan kerja keras perlu terus dilakukan. Dalam bagian berikut, akan diuraikan berbagai upaya yang telah dilakukan dan hasil yang dicapai.

Kebijakan yang telah dilaksanakan. Dengan belajar dari krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1997/98, kebijakan pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan tidak hanya memperhatikan aspek/dimensi pendapatan, namun juga memperhatikan dimensi non pendapatan, yaitu akses setiap rumah tangga dan individu terutama keluarga dan individu miskin terhadap kebutuhan dasar. Selain itu, secara global dirasakan pula bahwa dimensi-dimensi non-pendapatan ini merupakan bagian penting dalam kapasitas keluarga miskin untuk mampu secara proaktif dan partisipatif mengatasi dampak dari gejala sosial ekonomi dan bencana serta mengentaskan dirinya sendiri dari kemiskinan. Sehubungan dengan itu, perhatian dimensi non-pendapatan dalam kemiskinan secara eksplisit juga menjadi sasaran dalam strategi penanggulangan kemiskinan yang tertuang di dalam RPJMN 2004-2009.

Selanjutnya, dalam pelaksanaan RPJMN 2004-2009 setiap tahunnya, pelaksanaan kebijakan penanggulangan kemiskinan dan bantuan sosial, khususnya untuk masyarakat miskin dan rentan, juga terus dilakukan dengan mempertajam konsep program penanggulangan kemiskinan dan melakukan penataan agar program-program menjadi lebih fokus sehingga lebih mudah dikoordinasikan, dipantau, dan dievaluasi efektivitasnya.

Langkah strategis yang pertama adalah identifikasi rumah tangga miskin dan rentan. Sebelum tahun 2005, *targetted program* yang sangat dibutuhkan masyarakat masih menggunakan beragam data kemiskinan yang berbeda antara satu daerah dengan daerah lainnya. Keberadaan data yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi rumah tangga miskin dan rentan sangat dibutuhkan, terutama pada saat pemerintah melaksanakan kebijakan bantuan langsung kepada rumah tangga sasaran (RTS). Nilai strategis data ini bagi pemerintah adalah adanya data rumah tangga keluarga miskin dengan nama dan alamatnya sehingga *targetted program* didukung dengan basis data untuk distribusi penyaluran bantuan. Pada tahun 2008, data RTS hasil Pendataan Sosial Ekonomi Tahun 2005 (PSE-05) disempurnakan melalui Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS-08) untuk dapat mengidentifikasi anggota RTS yang memerlukan perlindungan sosial. Penyusunan data ini merupakan langkah penting untuk identifikasi masyarakat miskin dan rentan sehingga program keberpihakan kepada rumah tangga miskin dan rentan dapat ditargetkan dengan lebih tepat sasaran,



adil, dan efektif membantu rumah tangga mengatasi kerentanan dan keluar dari kemiskinan. Data PSE-05 sudah membantu pelaksanaan program kompensasi kenaikan harga BBM yang naik sebesar 114 persen pada tahun 2005 dan telah mengakibatkan penurunan daya beli masyarakat miskin sehingga pemerintah memutuskan untuk memberikan bantuan langsung tunai (BLT). Dana BLT ini merupakan bantuan kepada masyarakat miskin yang mengalami penurunan tingkat konsumsi karena meningkatnya harga kebutuhan pokok sebagai akibat kenaikan harga BBM. Adapun data PPLS-08 telah digunakan untuk membantu pelaksanaan program BLT tahun 2008, Jamkesmas, Raskin, dan PKH.

Langkah kedua adalah meningkatkan keberdayaan masyarakat miskin, yang dilaksanakan berlandaskan pada pemikiran bahwa salah satu strategi untuk menurunkan tingkat kemiskinan secara berkelanjutan adalah melalui pemberdayaan masyarakat miskin. Pemberdayaan dimaksudkan agar masyarakat miskin: (i) menyadari bahwa mereka memiliki potensi dan dapat berperan besar dalam mengentaskan dirinya dari kemiskinan; (ii) mengetahui kebutuhan mereka untuk mengentaskan dirinya dari kemiskinan; (iii) mengetahui sumberdaya dan akses layanan yang dapat digunakan untuk mengentaskan dirinya dari kemiskinan; (iv) mampu menjangkau sumber daya dan akses yang ada untuk memenuhi kebutuhannya dalam mengentaskan dirinya dari kemiskinan; (v) memiliki suara dan mampu menyuarakan kebutuhan dirinya dalam proses pengambilan keputusan bermasyarakat sehingga pembangunan di berbagai bidang akan sesuai dengan kebutuhan mereka dan membantu secara nyata dan efektif mengentaskan dirinya dari kemiskinan; dan (vi) memiliki akses untuk menyalurkan suara dan menampung suara kelompok masyarakat tersebut sehingga kebutuhannya mendapat prioritas tinggi untuk dapat direalisasikan.

Sebagai wujud dari perhatian akan pentingnya pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan, berbagai program yang berbasis masyarakat diharmonisasikan dan disinergikan ke dalam wadah program pemberdayaan masyarakat, melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri yang diluncurkan pada tahun 2007. Penyatuan program ini terus dilakukan dan pada tahun 2009 PNPM Mandiri diarahkan untuk memberdayakan masyarakat di seluruh kecamatan di Indonesia.

Dalam perkembangan pelaksanaan RPJMN 2004-2009, pada tahun 2008 banyak diperdebatkan ihwal jumlah dan jenis program yang termasuk di dalam program penanggulangan kemiskinan, mengingat kemiskinan memiliki dimensi pendapatan dan dimensi nonpendapatan yang lebih luas. Oleh karena itu, program-program penanggulangan kemiskinan dikelompokkan menjadi 3 (tiga) *cluster* yaitu: (i) program bantuan dan jaminan sosial, yaitu program yang ditujukan untuk membantu masyarakat dan keluarga miskin dalam menjangkau akses pelayanan dasar guna memenuhi kebutuhan dasarnya. Bantuan ini diberikan untuk meringankan beban hidup keluarga miskin; (ii) program pemberdayaan masyarakat atau dikenal dengan PNPM Mandiri, yaitu program yang memberi pendampingan dan pembekalan untuk memampukan

masyarakat miskin menentukan arah, langkah, dan upaya untuk memanfaatkan sumberdaya yang tersedia dalam rangka mengentaskan dirinya dari kemiskinan; (iii) program yang membantu usaha mikro dan kecil untuk meningkatkan dan memperluas usahanya agar masyarakat miskin semakin stabil dan meningkat pendapatannya. Ketiga kelompok program ini atau ketiga *cluster* inilah yang diarahkan sebagai program penanggulangan kemiskinan. Rincian dari program-program yang termasuk di dalam 3 (tiga) *cluster* ini selanjutnya dijabarkan di dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) setiap tahunnya.

Hasil Pelaksanaan. Perkembangan tingkat kemiskinan di Indonesia dalam 5 (lima) tahun terakhir terus menurun. Dengan menggunakan ukuran batas kemiskinan dalam Millennium Development Goals (MDGs) sebesar US\$ 1/kapita/hari (*Purchasing Power Parity*), pada tahun 2006 Indonesia telah mencapai target sasaran yang ditetapkan dalam Deklarasi MDG. Namun, dengan menggunakan garis kemiskinan nasional yang setara dengan US\$ 1,55/kapita/hari, pada tahun 2006 masih terdapat 39,3 juta penduduk Indonesia yang berada dalam kondisi miskin, atau setara dengan 17,75 persen penduduk. Penggunaan garis kemiskinan nasional yang lebih tinggi ini menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia memiliki tekad yang serius untuk meningkatkan kualitas standar hidup bangsa. Dengan tingkat kemiskinan yang masih relatif tinggi ini, pemerintah terus meningkatkan kebijakan penanggulangan kemiskinan dan melaksanakan berbagai program secara lebih terfokus dan terkoordinasi.

Melalui program-program perlindungan dan bantuan sosial, pemerintah sudah melaksanakan program subsidi beras untuk masyarakat miskin terhadap seluruh rumah tangga sasaran (RTS), yang pada tahun 2005-2007 diberikan kepada 19,1 juta RTS, dan pada tahun 2009 diberikan kepada 18,5 juta RTS sesuai dengan jumlah RTS yang semakin menurun. Untuk membantu masyarakat miskin memiliki akses pendidikan, disediakan pula program beasiswa untuk siswa dari rumah tangga miskin. Untuk meningkatkan akses terhadap layanan kesehatan, pemerintah mengembangkan program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dan layanan rumah sakit untuk kelas III kepada rumah tangga sasaran dan anggota keluarganya. Untuk lebih mendorong masyarakat memanfaatkan layanan pendidikan dan kesehatan ini, pemerintah menyediakan insentif melalui Program Keluarga Harapan (PKH) agar keluarga miskin memastikan anak-anaknya menjalani wajib belajar 9 tahun dan membawa balita mereka ke Puskesmas untuk pelayanan kesehatan dan gizi. Selain itu, untuk masyarakat rentan yang termasuk penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) pada tahun 2008 telah dilakukan bantuan sosial kepada 266.605 PMKS meliputi lanjut usia, anak terlantar, penyandang cacat, tuna sosial, dan anak nakal; 369.874 korban bencana alam; dan 12.049 komunitas adat terpencil.

Pelaksanaan PNPM Mandiri terus ditingkatkan pula. Pada tahun 2007, PNPM Mandiri sudah menjangkau dan melayani masyarakat di 2.831 kecamatan seluruh Indonesia. Pada tahun 2008 pelayanan ditingkatkan ke 3.999 kecamatan dan pada tahun 2009 menjangkau 6.408 kecamatan yang ada di Indonesia. Pelaksanaan PNPM Mandiri



telah membantu meningkatkan keberdayaan mereka untuk memusyawarahkan kebutuhan bersama dalam meningkatkan kesejahteraan terutama masyarakat miskin, melakukan kegiatan sosial, usaha ekonomi dan pembangunan infrastruktur perdesaan. Pelaksanaan PNPM Mandiri ini didukung pula oleh berbagai kementerian/lembaga melalui PNPM Agribisnis (Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan/PUAP), PNPM Kelautan dan Perikanan, dan PNPM Pariwisata yang baru dimulai tahun 2009.

Selanjutnya, dalam rangka mendukung peningkatan akses Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan koperasi kepada kredit/pembiayaan pemerintah juga telah menyediakan dana penjaminan untuk mendukung Kredit Usaha Rakyat (KUR). Dana penjaminan yang disediakan pemerintah pada tahun 2007-2009 adalah sebesar Rp. 1,95 triliun, sudah dapat mendorong tersalurnya KUR sebesar Rp. 16,4 triliun. Pelaksanaan program KUR sudah menjangkau 2,3 juta nasabah, yang sebanyak 96,3 persen di antaranya adalah nasabah mikro dengan nilai kredit di bawah Rp. 5 juta/nasabah.

Dengan berbagai program yang dikelompokkan ke dalam 3 *cluster* tersebut, tingkat kemiskinan dapat diupayakan terus menurun. Tingkat kemiskinan yang pada tahun 2007 sebesar 16,58 persen, pada tahun 2008 sudah menurun menjadi sebesar 15,42 persen atau sebanyak 34,96 juta penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan. Pada tahun 2009, tingkat kemiskinan menurun lagi menjadi 14,15 persen atau setara dengan 32,53 juta masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan.

1.2.1.2 Permasalahan dan Sasaran

Terus menurunnya tingkat kemiskinan sebagaimana diuraikan di atas menunjukkan bahwa kebijakan dan langkah-langkah yang dilakukan telah mengangkat sebagian masyarakat dari bawah garis kemiskinan. Meskipun demikian, penurunan kemiskinan dalam 5 (lima) tahun terakhir berjalan lambat. Selain itu, dengan meningkatnya kerentanan masyarakat, sistem perlindungan sosial untuk masyarakat miskin dan rentan perlu terus ditingkatkan cakupan dan kualitas pelayanannya. Beberapa permasalahan yang masih dihadapi untuk terus menurunkan kemiskinan yaitu: (a). terbatasnya cakupan dan kualitas pelayanan bantuan sosial; (b). masih adanya ketimpangan tingkat kesejahteraan masyarakat antar provinsi; (c). akses masyarakat terhadap kebutuhan dasar secara rata-rata masih rendah, dan terdapat perbedaan akses antarkelompok pendapatan; (d). adanya globalisasi yang meningkatkan gejolak ekonomi dan menimbulkan kerentanan di dalam masyarakat terutama masyarakat miskin dan rentan; (e). meningkatnya kerentanan masyarakat miskin sebagai akibat dari perubahan iklim.

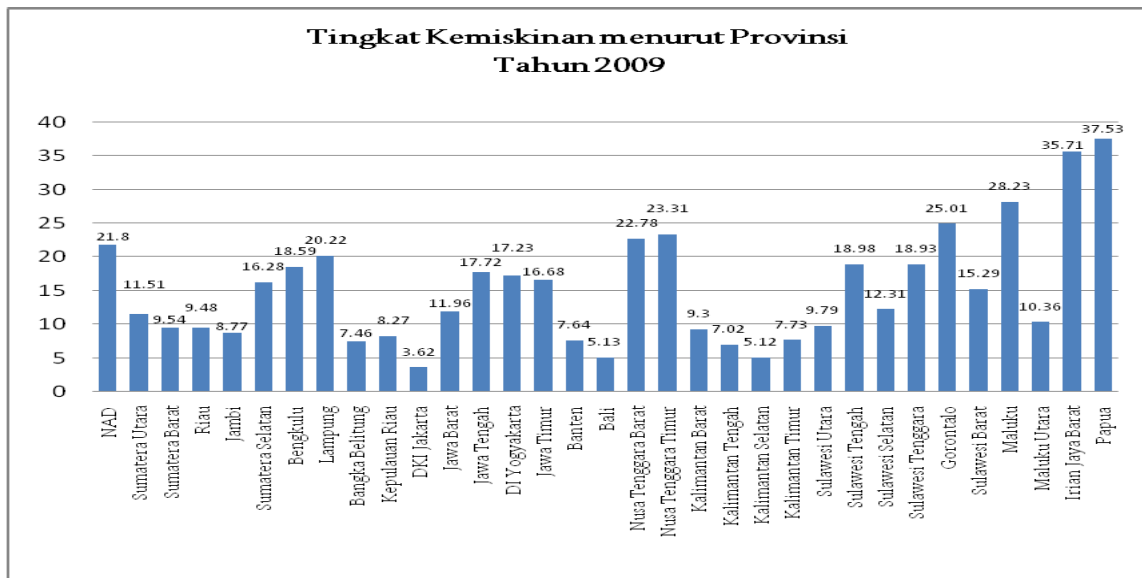
Secara rinci, kelima permasalahan tersebut diuraikan sebagai berikut.

1. Terbatasnya cakupan dan kualitas pelayanan bantuan sosial disebabkan oleh beberapa hal, yaitu: (i) masih belum teridentifikasinya semua PMKS yang perlu

dibantu; (ii) belum lengkapnya kebijakan dan program untuk PMKS; dan (iii) masih terbatasnya kapasitas pelayanan

2. Ketimpangan tingkat kesejahteraan masyarakat antarprovinsi masih cukup besar. Meskipun penduduk miskin secara nasional terus menurun, penurunan tingkat kemiskinan di tingkat provinsi masih bervariasi. Tingkat kemiskinan di Indonesia Timur masih di atas rata-rata nasional. Dalam Gambar 1.1 tampak bahwa sebanyak 17 provinsi memiliki tingkat kemiskinan di bawah rata-rata nasional dan sebanyak 16 provinsi memiliki tingkat kemiskinan di atas rata-rata. Beberapa provinsi yang tingkat kemiskinannya di bawah rata-rata nasional yaitu Sumut, Sumbar, Riau, Jambi, Bangka Belitung, Kepulauan Riau, DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Bali, Kalbar, Kalteng, Kalsel, Kaltim, Sulut, Sulsel dan Maluku Utara; sedangkan provinsi yang berada di atas rata-rata nasional yaitu provinsi: NAD, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, NTT, NTB, Sulteng, Sultra, Gorontalo, Sulbar, Maluku dan Papua serta Irian Jaya Barat.
- Permasalahan yang dihadapi adalah keragaman kapasitas masyarakat dan aparat Pemda untuk memanfaatkan sumberdaya lokal dalam mempercepat penurunan kemiskinan di daerah.

GAMBAR 1.1
TINGKAT KEMISKINAN TINGKAT PROVINSI TAHUN 2009



Sumber: BPS, 2009

3. Akses masyarakat miskin terhadap kebutuhan dasar masih rendah, dan terjadi ketimpangan akses, baik antarkelompok masyarakat maupun antarwilayah. Pada kondisi mikro, dimensi kemiskinan lebih luas dan riil. Pada tataran mikro ini, kondisi kemiskinan dilihat berdasarkan pada aspek-aspek pemenuhan

kebutuhan pokok, misalnya akses terhadap air bersih, akses terhadap sanitasi, akses terhadap listrik, akses terhadap sekolah, akses terhadap pelayanan kesehatan dan konsumsi bahan pangan. Untuk pemenuhan kalori, ternyata kecukupan masih di bawah 2.100 kkal/hari sedangkan akses terhadap sanitasi sudah cukup baik dibandingkan yang lain (Tabel 1.4 dan Tabel 1.5).

TABEL 1.4
TINGKAT PEMENUHAN KEBUTUHAN DASAR ANTAR KELOMPOK MASYARAKAT

Quintile	Pasokan Kalori		APS (7-12 Tahun)		APS (13-15 Tahun)		APS (16-18 Tahun)	
	(kkal/kap/hari)	Ratio Terhadap Q5	(%)	Ratio Terhadap Q5	(%)	Ratio Terhadap Q5	(%)	Ratio Terhadap Q5
1	1.613	0,70	98,4	0,99	74,3	0,80	37,8	0,53
2	1.856	0,80	98,8	0,99	82,0	0,88	47,3	0,67
3	2.007	0,87	99,0	1,00	87,2	0,94	55,8	0,79
4	2.133	0,92	99,2	1,00	91,0	0,98	62,3	0,88
5	2.308	1,00	99,4	1,00	93,2	1,00	70,8	1,00
Total	1.983	0,86	98,9	0,99	84,8	0,91	55,1	0,78

Sumber: Susenas 2008, BPS

Selain akses penduduk secara rata-rata terhadap pelayanan dasar masih rendah, terjadi pula ketimpangan akses antarkelompok pendapatan. Pada tahun 2008 kelompok masyarakat berpendapatan tinggi (quintile 3, 4 dan 5), tingkat konsumsi kalorinya berada di atas 2.000 kkal, sedangkan kelompok miskin/pendapatan rendah berada pada tingkat 1.613 kkal. Hal yang sama terjadi pada setiap indikator. Meskipun demikian, akses terhadap sekolah lanjutan atas, akses terhadap dokter dan air bersih menunjukkan ketimpangan yang lebih tinggi dibandingkan dengan indikator dalam bidang lainnya (Tabel 1.4 dan Tabel 1.5). Permasalahan yang dihadapi adalah: (i) pemahaman masyarakat akan pentingnya pemenuhan kebutuhan dasar bagi kesejahteraannya; (ii) kemampuan (pendapatan) masyarakat untuk memenuhi dengan kemampuan sendiri; dan (iii) penyediaan layanan kebutuhan dasar yang masih belum dapat menjangkau masyarakat luas, terutama daerah terpencil dan daerah yang sulit dijangkau pelayanan dasar.

TABEL 1.5
TINGKAT PEMENUHAN KEBUTUHAN DASAR ANTAR KELOMPOK MASYARAKAT
(LANJUTAN)

Quintile	Akses Ke Dokter		Akses Ke Puskesmas		Akses Air Bersih		Akses ke Sanitasi	
	%	Ratio Terhadap Q5	%	Ratio Terhadap Q5	%	Ratio Terhadap Q5	%	Ratio Terhadap Q5
1	13,5	0,27	49,4	2,41	39,0	0,52	52,6	0,56
2	20,0	0,40	42,6	2,08	44,4	0,59	63,2	0,68
3	26,7	0,54	38,7	1,89	49,7	0,66	72,7	0,78
4	35,0	0,70	32,3	1,58	58,7	0,78	83,4	0,89
5	49,8	1,00	20,5	1,00	75,2	1,00	93,6	1,00
Total	30,3	0,61	35,6	1,74	54,1	0,72	73,9	0,79

Sumber: Susenas 2008, BPS.

Selain itu, pemenuhan beberapa kebutuhan dasar antarwilayah pada tahun 2008 masih sangat timpang. Hal ini terlihat pada Tabel 1.6, antara lain, dari: (1) lebih dari 20 persen rumah tangga di Provinsi Papua, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, NTT, Sulawesi Tengah dan Maluku yang atap bangunan tempat tinggalnya masih memakai daun/ijuk; (2) lebih dari 50 persen rumah tangga di Provinsi-Provinsi selain DKI Jakarta, Kalimantan Timur dan Bali yang air minumannya bukan dari air ledeng; (3) lebih dari 20 persen rumah tangga selain di Bali, DKI Jakarta, DI Yogyakarta dan Banten yang dinding tempat tinggalnya bukan tembok; (4) lebih dari 60 persen rumah tangga di Papua dan NTT yang penerangan tempat tinggalnya bukan dari PLN; dan (5) lebih dari 15 persen rumah tangga di Provinsi Jawa Tengah, Papua, Maluku Utara, Jawa Timur, Lampung, dan Maluku yang tempat tinggalnya masih dengan lantai tanah.

TABEL 1.6
PERSENTASE RUMAH TANGGA (RT) BERDASARKAN BERBAGAI INDIKATOR
KEBUTUHAN DASAR TAHUN 2008

No.	Provinsi	RT dg Atap Daun/Ijuk	RT dg Air Minum Bukan Ledeng	RT dg Dinding Bukan Tembok	RT dg Penerangan Rumah Non PLN	RT dg Lantai Tanah
1	NAD	15,8	76,7	64,1	11,5	10,4
2	Sumatera Utara	6,8	72,3	49,1	9,2	5,5
3	Sumatera Barat	2,2	74,1	31,0	13,9	3,5
4	R i a u	5,2	78,1	50,1	32,6	2,6
5	J a m b i	2,9	76,1	50,4	29,0	5,4
6	Sumatera Selatan	6,5	73,3	54,6	28,0	10,4
7	Bengkulu	0,3	82,8	45,3	28,5	8,9
8	Lampung	1,1	90,0	38,4	25,2	19,4
9	Kep. Bangka Belitung	3,2	80,1	36,9	24,4	2,8
10	Kep. Riau	7,3	57,8	49,4	31,3	5,2
11	DKI Jakarta	0,3	25,7	8,7	1,0	1,8
12	Jawa Barat	0,3	76,6	23,0	2,3	5,6
13	Jawa Tengah	0,1	81,1	31,0	2,0	26,1
14	DI Yogyakarta *)	-	75,3	12,7	1,8	9,4
15	Jawa Timur	0,1	75,7	22,2	2,5	19,5
16	Banten	3,2	63,9	19,7	4,1	8,1
17	B a l i	0,7	48,2	6,3	2,7	5,4
18	Nusa Tenggara Barat	6,5	79,1	33,1	15,4	11,9
19	Nusa Tenggara Timur	26,4	82,2	72,0	62,6	41,0
20	Kalimantan Barat	11,7	86,5	49,3	30,6	2,7
21	Kalimantan Tengah	8,4	80,0	84,1	34,4	3,4
22	Kalimantan Selatan	19,7	60,9	85,8	9,5	2,2
23	Kalimantan Timur	2,8	39,7	68,7	16,8	3,6
24	Sulawesi Utara	6,2	63,3	36,7	5,9	9,5
25	Sulawesi Tengah	22,2	80,2	52,4	29,2	8,4
26	Sulawesi Selatan	9,1	72,0	67,4	16,1	3,9
27	Sulawesi Tenggara	27,3	79,5	65,9	30,3	11,1
28	Gorontalo	17,2	81,6	41,4	27,1	10,2
29	Sulawesi Barat	27,6	80,1	72,3	44,9	7,7
30	Maluku	21,9	85,0	33,0	30,2	15,6
31	Maluku Utara	18,2	78,1	32,8	36,5	19,5
32	Irian Jaya Barat	9,7	73,5	54,8	48,8	10,9
33	Papua	46,1	81,4	75,3	62,9	23,8

Sumber: Susenas 2008, BPS, *) DI Yogyakarta tidak mencakup Kabupaten Bantul

- Data tidak tersedia

4. Kemiskinan dan Kerentanan. Globalisasi telah memberi dampak positif, yaitu membuka peluang pertumbuhan ekonomi dalam bentuk/melalui perluasan pasar baru bagi barang dan jasa yang memiliki tingkat kemampuan untuk bersaing di pasar. Pada saat yang sama, globalisasi juga berpengaruh pada fluktuasi di pasar domestik. Hal ini menimbulkan kecenderungan fluktuasi harga pada bahan kebutuhan pokok yang dapat mengganggu kesejahteraan masyarakat miskin dan PMKS. Tantangan baru yang timbul adalah bagaimana dan sejauh mana pemerintah berperan untuk mewujudkan stabilisasi harga kebutuhan pokok agar penghidupan masyarakat tidak semakin memburuk. Dalam kaitan dengan ini, termasuk perlunya kebijakan baru untuk keadaan darurat apabila terdapat gangguan dalam perekonomian yang akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat, terutama masyarakat miskin. Permasalahan yang perlu diatasi adalah menyiapkan kebijakan dan instrument kontijensi, memperluas cakupan dan penyempurnaan kualitas pelayanan bantuan sosial, serta menyiapkan aparat pelaksana untuk memiliki kesiapan dalam pelaksanaannya.
5. Perubahan iklim juga membawa pengaruh pada fluktuasi kondisi alam yang mengganggu kehidupan masyarakat pada umumnya dan masyarakat miskin pada khususnya. Perubahan iklim, antara lain, dapat berpengaruh pada: (i) kacaunya pola tanam yang disebabkan oleh musim (hujan dan kemarau) yang tidak menentu lagi; dan (ii) kejadian bencana alam yang semakin tinggi frekuensi dan besarnya (*magnitude*). Sebagai akibatnya, produksi pertanian menjadi terganggu, pendapatan sebagian besar penduduk miskin yang bergantung pada kegiatan pertanian juga menjadi tidak menentu sehingga meningkatkan kerentanan dan memperberat upaya masyarakat untuk mengentaskan dirinya dari kemiskinan. Di sisi konsumsi, ketersediaan air yang tidak teratur juga mengganggu pasokan air bersih dan sanitasi yang berdampak pada kesehatan masyarakat miskin dan masyarakat secara menyeluruh. Untuk itu, perlu dikembangkan kegiatan mitigasi dan adaptasi sehingga dapat memberi manfaat tidak saja bagi masyarakat miskin tetapi juga sebagai sumber pendapatan baru.

Sasaran Bidang. Dengan berbagai permasalahan yang dihadapi tersebut, sasaran bidang penanggulangan kemiskinan dan pemerataan pembangunan dalam RPJMN 2010-2014 adalah menurunkan tingkat kemiskinan menjadi sebesar 8-10% pada akhir 2014.

1.2.1.3 Strategi dan Arah Kebijakan

Untuk mencapai sasaran tersebut dan dengan memperhatikan permasalahan serta tantangan yang ada sebagaimana diuraikan di atas, arah kebijakan yang ditempuh dalam rangka mempercepat penurunan kemiskinan adalah: (i) meningkatkan pertumbuhan pada sektor-sektor yang menyerap tenaga kerja dan efektif menurunkan



kemiskinan; (ii) melengkapi dan menyempurnakan kebijakan penanggulangan kemiskinan, terutama yang berkaitan dengan pemenuhan hak masyarakat miskin, perlindungan sosial, dan pemberdayaan masyarakat; (iii) meningkatkan efektivitas pelaksanaan penurunan kemiskinan di daerah.

Arah kebijakan 1: Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang mengikutsertakan dan dapat dinikmati sebanyak-banyaknya masyarakat terutama masyarakat miskin (*pro poor growth*)

Beberapa kegiatan ekonomi yang perlu didukung pengembangannya dalam rangka mempercepat penurunan kemiskinan adalah, sebagai berikut.

1. Meningkatkan dan mengembangkan pertumbuhan ekonomi dalam sektor-sektor yang memiliki dampak terhadap penurunan kemiskinan secara signifikan, misalnya penumbuhan dan pengembangan pasar tradisional, peningkatan produktivitas dan nilai tambah usaha pertanian, dan pengembangan usaha mikro dan kecil.
2. Pertumbuhan ekonomi diarahkan pada industri yang banyak menggunakan sumberdaya alam lokal untuk meningkatkan perekonomian daerah.

Arah pengembangan kegiatan ekonomi tersebut di atas merupakan bagian dari Prioritas 7, Iklim Investasi dan Iklim Usaha.

Arah Kebijakan 2: Meningkatkan kualitas kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan melalui kebijakan afirmatif/keberpihakan

Arah kebijakan penanggulangan kemiskinan pada era 2010-2014 yang merupakan inti dari Prioritas 4, Penanggulangan Kemiskinan, ditujukan untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas kebijakan dalam rangka mempercepat penurunan kemiskinan, dengan:

1. meningkatkan dan menyempurnakan kualitas kebijakan perlindungan sosial berbasis keluarga dalam rangka membantu pemenuhan kebutuhan dasar bagi masyarakat miskin, untuk memutus rantai kemiskinan dan mendukung peningkatan kualitas SDM;
2. meningkatkan cakupan dan kualitas pelayanan bantuan sosial untuk PMKS;
3. menyempurnakan dan meningkatkan efektivitas pelaksanaan PNPM Mandiri;

4. meningkatkan sinkronisasi kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan, serta harmonisasi antarpelaku dan para pihak agar efektif dalam menurunkan tingkat kemiskinan.

Arah kebijakan ini akan dilakukan melalui 4 (empat) fokus prioritas, yaitu:

Fokus 1, Peningkatan dan Penyempurnaan Kualitas Kebijakan Perlindungan Sosial berbasis Keluarga.

Beberapa kegiatan prioritas dalam fokus ini di antaranya adalah: (i) menyempurnakan pelaksanaan program perlindungan sosial berbasis keluarga dalam rangka memenuhi hak masyarakat miskin; (ii) menyempurnakan data kemiskinan dan *targeting* program penanggulangan kemiskinan; dan (iii) menyediakan kebijakan dan intervensi khusus untuk membantu masyarakat dalam mengatasi dampak dari bencana alam dan gejala perekonomian nasional; dan (iv) meningkatkan cakupan dan kualitas pelayanan dan rehabilitasi sosial anak terlantar, lansia terlantar dan penyandang cacat terlantar dan/atau berat; bantuan sosial bagi korban bencana alam dan bencana sosial; serta bantuan pemberdayaan sosial bagi fakir miskin dan komunitas adat terpencil.

Fokus 2, Menyempurnakan dan Meningkatkan Efektivitas Pelaksanaan PNPM Mandiri.

Penyempurnaan, peningkatan efektivitas PNPM Mandiri akan dilakukan, antara lain, dengan: (i) memperkuat dan meningkatkan kualitas pelaksanaan PNPM Mandiri di kecamatan miskin; (ii) meningkatkan fungsi kelembagaan yang dibangun melalui PNPM Mandiri sebagai perwujudan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa/daerah; dan (iii) mengintegrasikan secara selektif PNPM Pendukung untuk mendukung percepatan penanggulangan kemiskinan.

Fokus 3, Peningkatan Akses Usaha Mikro dan Kecil kepada Sumberdaya Produktif

Pelaksanaan fokus prioritas ini akan dilakukan, antara lain, melalui: (i) peningkatan budaya usaha dan kewirausahaan dalam kemampuan pengelolaan/manajemen usaha; (ii) peningkatan penyediaan layanan informasi dan konsultasi usaha (teknis, manajemen usaha dan keuangan, teknologi dan pemasaran); (iii) fasilitasi untuk penguatan produksi, pemasaran dan kerjasama pemasaran; dan (iv) peningkatan fasilitasi dan skema pendanaan usaha termasuk Kredit Usaha Rakyat dan modal awal usaha (*start up capital*) yang mudah dan cepat.

Fokus 4, Peningkatan Sinkronisasi dan Efektivitas Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan serta Harmonisasi Antarpelaku.

Pelaksanaan fokus prioritas ini dilakukan melalui kegiatan: (i) revitalisasi komite nasional penanggulangan kemiskinan (ii) peningkatan kapasitas dan fungsi



Kementerian/Lembaga serta Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam suatu forum bersama penanggulangan kemiskinan di tingkat Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota; (iii) meningkatkan kerjasama dan partisipasi swasta melalui *Corporate Social Responsibility (CSR)* dan lembaga masyarakat lain, misalnya dana *Zakat Infak dan Sadaqoh (ZIS)* dan dana masyarakat lainnya; dan (iv) penerapan sistem monitoring dan evaluasi yang akurat sebagai dasar keputusan dan alokasi anggaran.

Arah Kebijakan 3: Peningkatan efektivitas penurunan kemiskinan di daerah, terutama daerah tertinggal, terdepan dan terluar

Berdasarkan pola karakteristik daerah serta tingkat kemiskinan yang ada, arah kebijakan ini akan ditempuh melalui:

1. Pemberdayaan sektor informal dan UMKM serta koperasi merupakan kebijakan dasar bagi semua daerah untuk mendorong penciptaan lapangan kerja dalam rangka penurunan kemiskinan. Dalam kaitan ini, Pemda terutama kabupaten/kota perlu memiliki keberpihakan dan memberi kesempatan usaha yang jelas kepada sektor informal terutama UMKM serta Koperasi dalam rangka meningkatkan pendapatan kaum miskin di daerah.
2. Pengembangan diversifikasi usaha di perdesaan melalui agroindustri berbasis sumberdaya lokal yang didukung oleh pembangunan infrastruktur perdesaan.

Arah kebijakan ini merupakan bagian dari Prioritas 10, Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar dan Pasca Konflik.

1.2.2 Perubahan Iklim Global

1.2.2.1 Kondisi Umum

Perubahan iklim yang terjadi dalam satu abad terakhir telah menjadi isu global sekaligus merupakan tantangan pembangunan nasional. Sedikitnya terdapat empat indikator yang menunjukkan terjadinya perubahan iklim yang berdampak signifikan terhadap berlangsungnya kehidupan, yaitu kenaikan permukaan air laut, kenaikan temperatur udara, perubahan curah hujan, dan iklim, serta peningkatan frekuensi iklim ekstrim yang berdampak pada peningkatan frekuensi dan intensitas bencana terkait iklim, seperti banjir, kekeringan, kebakaran hutan, dan menurunnya keanekaragaman hayati.

Indonesia sebagai negara kepulauan sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim, Dampaknya secara sosial dan ekonomi dapat menurunkan pendapatan petani/nelayan antara lain karena berubahnya musim tanam dan bencana alam yang semakin kerap terjadi.

Perubahan iklim sudah mulai secara nyata dirasakan, dan dampaknya telah secara nyata pula menyebabkan permasalahan pembangunan di berbagai sektor. Sebagai contoh, kenaikan muka air laut yang terjadi di Indonesia telah mempengaruhi pola perhubungan antar pulau, kerusakan sarana dan prasarana pesisir, intrusi air laut yang makin tinggi, dan kemampuan nelayan untuk melaut dan mencari nafkah. Selain itu, pola perubahan cuaca juga telah mempengaruhi pola tanam pertanian serta pola penyakit yang ada di Indonesia. Selain dampak perubahan iklim tersebut, Indonesia sebagai bagian dari masyarakat Internasional juga perlu menyumbang upaya untuk mengurangi laju perubahan iklim dengan mengurangi emisi karbon dan meningkatkan penyerapan karbon. Hal ini dilakukan khususnya pada sektor-sektor energi, kehutanan, lahan gambut, dan limbah. Tahun 2009 Indonesia telah berinisiatif menurunkan emisi gas rumah kaca (GRK) pada tahun 2020 sebesar 26 persen dari kondisi tanpa rencana aksi (business as usual-BAU) dengan usaha sendiri, serta menurunkan 41 persen jika dibantu dengan dukungan dari internasional. Upaya adaptasi dan mitigasi tersebut adalah dalam kerangka pembangunan berkelanjutan dan berkeseimbangan baik dari aspek ekonomi, sosial dan lingkungan.

Penanggulangan dampak perubahan iklim dilakukan dengan melaksanakan proses pembangunan yang memperhatikan dampak suatu kegiatan terhadap pelepasan gas rumah kaca serta peningkatan kapasitas adaptasi suatu sektor terhadap dampak perubahan iklim seperti perubahan pola cuaca, curah hujan, temperatur dan kenaikan muka air laut. Upaya penanggulangan ini tidak akan dapat berjalan dengan baik tanpa upaya pengintegrasian ke dalam berbagai sektor pembangunan. Untuk itu, perubahan iklim sudah harus mulai diinternalisasikan ke dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di berbagai sektor sehingga kebijakan adaptasi dan mitigasi ini merupakan kebijakan yang sifatnya lintas sektor dan lintas bidang, yang dilakukan secara terintegrasi dalam satu kesatuan kerangka kebijakan pembangunan nasional.

Banyaknya pemangku kepentingan yang berperan dalam penanggulangan perubahan iklim mengharuskan adanya koordinasi serta sinergi yang baik antarberbagai pihak tersebut. Oleh karena itu, upaya ini harus bersifat membuka akses seluruh pihak agar dapat berperan aktif di dalamnya terutama dalam mewujudkannya. Untuk itu, proses pengarusutamaan perubahan iklim tidak dapat dilakukan semata oleh satu sektor/bidang pembangunan karena sumber dan dampak perubahan iklim terkait dengan berbagai kegiatan pembangunan di banyak sektor, seperti kehutanan, energi, pertanian, dan kelautan.

Dalam mengidentifikasi kegiatan perubahan iklim dalam RPJM ini dilakukan dengan merumuskan kriteria/pertimbangan utama sebagai berikut.

1. Terkait mitigasi: dampak kegiatan pembangunan terhadap jumlah emisi karbon (GRK), dimana kegiatan pembangunan yang direncanakan diupayakan dapat membantu penurunan emisi gas rumah kaca, Diharapkan dengan upaya ini akan dihasilkan arah pembangunan rendah karbon (*low carbon development*)

2. Terkait adaptasi: mempertimbangkan kenaikan temperatur, kenaikan muka air laut pergeseran musim, dan kejadian iklim ekstrim sehingga kegiatan pembangunan yang direncanakan terutama pada sektor yang menerima dampak perubahan iklim seharusnya sudah mempertimbangkan dampak dari indikator perubahan iklim tersebut.

Sektor yang diprioritaskan dalam kegiatan perubahan iklim adalah sebagai berikut.

1. Mitigasi: Kehutanan, Lahan Gambut, Energi, Termasuk Transportasi, Industri dan Pengolahan Limbah.
2. Adaptasi: Pertanian, Kelautan Perikanan, Pesisir, Sarana dan Prasarana, Kesehatan
3. Pendukung: Data Informasi dan Komunikasi, Penguatan Kapasitas Kelembagaan dan IPTEK.

Dalam hal penanganan perubahan iklim, berbagai upaya adaptasi dan mitigasi yang dilakukan, perlu terus diikuti dengan peningkatan kapasitas, mencakup kapasitas kelembagaan penanganan dampak perubahan iklim, dan kapasitas dan partisipasi masyarakat dalam penanganannya.

1.2.2.2 Permasalahan dan Sasaran

Berbagai isu terkait dengan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim adalah sebagai berikut (1) **Rendahnya kapasitas sumber daya manusia dan institusi pengelola**. Hal ini menyebabkan upaya adaptasi dan mitigasi yang dilakukan kurang efektif. Penanganan yang bersifat parsial dan terkotak-kotak juga menjadi salah satu kendala dalam penanganan dampak perubahan iklim ini. (2) **Masih terbatasnya ketersediaan data dan informasi** terkait dengan adaptasi dan mitigasi yang menyebabkan belum optimalnya upaya adaptasi dan mitigasi yang dilakukan. (3) **Masih kurangnya kesadaran masyarakat** terhadap upaya penanganan perubahan iklim juga menjadi salah satu kendala yang berkontribusi terhadap kurang optimalnya upaya adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim global ini, yang masyarakat masih belum menyadari perlunya merubah pola hidup terkait dengan adanya fenomena perubahan iklim ini,

1.2.2.3 Strategi dan Arah Kebijakan

Mengingat hal-hal tersebut di atas, kebijakan lintas bidang untuk mengantisipasi dampak serta laju perubahan iklim dalam tahun 2010-2014 diarahkan untuk mewujudkan peningkatan kapasitas penanganan dampak dan laju perubahan iklim yang tepat dan akurat. Sementara itu, strategi untuk mencapai kebijakan ini adalah: (1)

peningkatan kapasitas adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di berbagai sektor pembangunan dan penguatan kelembagaan; (2) penyediaan dana alternatif untuk pelaksanaan kegiatan dalam rangka pengendalian perubahan iklim; (3) pengurangan emisi di sektor energi, kehutanan dan limbah; (4) peningkatan kapasitas adaptasi sektor dan daerah terutama dalam bidang pertanian, kelautan dan perikanan, kesehatan dan sumber daya air; (5) pengembangan kebijakan dan peraturan perundangan mengenai perubahan iklim.

1.2.3 Pembangunan Kelautan Berdimensi Kepulauan

1.2.3.1 Kondisi Umum

Pembangunan kelautan berdimensi negara kepulauan adalah pembangunan yang berorientasi pada pengembangan potensi kepulauan secara ekonomi, ekologis dan sosial yang ditunjukkan guna meningkatkan pemanfaatan dari sumber daya yang ada di dalamnya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat generasi sekarang dan generasi selanjutnya.

Wilayah negara Indonesia terdiri dari pulau-pulau yang dihubungkan oleh laut yang mempersatukan pulau-pulau yang tersebar di seluruh khatulistiwa. Wawasan Nusantara adalah konsep politik bangsa Indonesia yang memandang Indonesia sebagai satu kesatuan wilayah, meliputi matra darat, matra laut termasuk dasar laut dan tanah di bawahnya dan matra udara di atasnya secara tidak terpisahkan, yang menyatukan bangsa dan negara secara utuh menyeluruh mencakup segenap bidang kehidupan nasional yang meliputi aspek politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan.

Saat ini, tata kelola wilayah kita masih bias ke daratan dan tata kelola wilayah lautan masih partial sehingga kebijakan yang ada tidak utuh dan terintegrasi. Padahal, sebagai negara kepulauan, jika sebagian besar kebijakan dan pendekatan negara kepulauan (*archipelagic state*) dapat dikedepankan, dan laut sebagai pusat pertimbangan (*center of attention*) dari segala kebijakan yang dilaksanakan, lautan yang luas dengan berbagai potensi yang sangat besar akan dapat menjadi sumber kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Selain itu, kekayaan negara ini dapat kita jaga dengan baik sehingga tidak akan terjadi lagi perpindahan kepemilikan pulau-pulau terluar kita oleh negara lain serta dapat dikendalikan pencurian hasil laut di wilayah Indonesia, dan sebagainya.

Dengan bekal modal dasar NKRI sebagai negara kepulauan terbesar kedua di dunia, pendekatan pendekatan *archipelagic state* sebagai kerangka pembangunan nasional harus dilakukan sebagai pengejawantahan dari falsafah Pancasila dan UUD 1945. Pengembangan NKRI sebagai negara kepulauan juga diamanatkan dalam Deklarasi Djoeanda Tahun 1957 dan mendapatkan pengakuan Internasional pada tahun 1982 melalui *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS). Selain itu,



kebijakan pembangunan kelautan berdimensi kepulauan ini merupakan upaya untuk melaksanakan salah satu misi pembangunan nasional (dalam PJPN 2005-2025) yaitu Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, kuat, dan berbasis kepentingan Nasional.

1.2.3.2 Permasalahan dan Sasaran

Saat ini, pemanfaatan kekayaan negara kita sebagai negara kepulauan masih belum optimal dibandingkan potensinya. Hal tersebut terjadi karena masih banyaknya kendala yang dihadapi. Kendala ini selain jadi permasalahan juga sekaligus menjadi tantangan untuk kita menjadikan Indonesia menjadi negara kepulauan yang tangguh dan diperhitungkan di mata dunia. Berbagai permasalahan dan tantangan yang dihadapi adalah sebagai berikut.

Sebagai negara kepulauan yang memiliki banyak pulau kecil, Indonesia sangat potensial sebagai wilayah untuk pariwisata bahari. Meskipun demikian, karena minimnya infrastruktur pendukung baik itu, transportasi antarpulau maupun prasarana dasar lainnya, potensi pariwisata ini belum berkembang optimal. Minimnya infrastruktur ini juga menimbulkan adanya kesenjangan baik antara pulau besar dan pulau kecil maupun antara wilayah barat dan timur. Jika ini tidak segera ditanggapi, laut yang seharusnya menjadi perekat NKRI bisa menjadi penghalang atau pemisah.

Belum terselesaikannya batas wilayah laut dengan negara tetangga. Permasalahan pertahanan dan keamanan di laut saat ini juga masih menjadi hal yang krusial untuk segera diselesaikan. Wilayah laut ZEEI (Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia) yang belum diselesaikan meliputi perbatasan dengan Malaysia, Filipina, Palau, Papua New Guinea, Timor Leste, India, Vietnam, dan Thailand, sedangkan batas laut teritorial yang belum disepakati meliputi perbatasan dengan Singapura (bagian timur), Malaysia, dan Timor Leste. Selain itu, ada potensi untuk mendapatkan tambahan wilayah laut dengan perjanjian batas landas kontinen. Kemampuan diplomasi Indonesia dalam kancah internasional juga masih lemah sehingga merupakan kendala tersendiri yang perlu diatasi. Masih sering terjadinya kasus perompakan di wilayah perairan Indonesia.

Masih lemahnya pengendalian dan pengawasan sumber daya kelautan, masih tingginya pelanggaran di wilayah laut, seperti pembuangan limbah B3 (Bahan beracun berbahaya), maraknya praktik *illegal fishing*, dan penjualan pasir laut, merupakan aktivitas yang dapat merusak kualitas lingkungan perairan dan juga sumberdaya alam di dalamnya.

Wilayah perbatasan dan terpencil kondisinya masih terbelakang, terutama di pulau kecil perbatasan. Wilayah perbatasan, termasuk pulau-pulau kecil terluar memiliki potensi sumber daya alam yang cukup besar, serta merupakan wilayah yang sangat strategis bagi pertahanan dan keamanan negara. Namun, pembangunan di beberapa wilayah perbatasan masih sangat jauh tertinggal dibandingkan dengan pembangunan di wilayah negara tetangga. Kondisi sosial ekonomi masyarakat yang

tinggal di daerah ini umumnya jauh lebih rendah dibandingkan dengan kondisi sosial ekonomi warga negara tetangga. Hal ini telah mengakibatkan timbulnya berbagai kegiatan ilegal di daerah perbatasan yang dikhawatirkan dalam jangka panjang dapat menimbulkan berbagai kerawanan sosial. Permasalahan utama dari ketertinggalan pembangunan di wilayah perbatasan adalah arah kebijakan pembangunan kewilayahan yang selama ini cenderung berorientasi *'inward looking'* sehingga seolah-olah kawasan perbatasan hanya menjadi halaman belakang dari pembangunan negara. Sementara itu, pulau-pulau kecil yang ada di Indonesia sulit berkembang terutama karena lokasinya sangat terisolir dan sulit dijangkau. Di antaranya banyak yang tidak berpenghuni atau sangat sedikit jumlah penduduknya, serta belum tersentuh oleh pelayanan dasar dari pemerintah.

Habitat ekosistem pesisir dan laut semakin rusak sehingga menyebabkan menurunnya ketersediaan sumberdaya plasma nutfah dan meluasnya abrasi pantai. Kerusakan habitat ekosistem di wilayah pesisir dan laut semakin meningkat, khususnya di wilayah padat kegiatan, seperti pantai utara Pulau Jawa dan pantai timur Pulau Sumatera. Rusaknya habitat ekosistem pesisir seperti deforestasi hutan mangrove serta terjadinya degradasi sebagian besar terumbu karang dan padang lamun telah mengakibatkan erosi pantai dan berkurangnya keanekaragaman hayati (*biodiversity*). Erosi ini juga diperparah oleh perencanaan tata ruang dan pengembangan wilayah yang kurang tepat. Beberapa kegiatan yang diduga sebagai penyebab terjadinya erosi pantai, antara lain pengambilan pasir laut untuk reklamasi pantai, pembangunan hotel, dan kegiatan-kegiatan lain yang bertujuan untuk memanfaatkan pantai dan perairannya. Sementara itu, laju sedimentasi yang merusak perairan pesisir juga terus meningkat. Beberapa muara sungai di Sumatera, Kalimantan, dan Jawa mengalami pendangkalan yang cepat, akibat tingginya laju sedimentasi yang disebabkan oleh kegiatan di lahan atas yang tidak dilakukan dengan benar, bahkan mengabaikan asas konservasi tanah. Di samping itu, tingkat pencemaran di beberapa kawasan pesisir dan laut juga berada pada kondisi yang sangat memprihatinkan. Sumber utama pencemaran pesisir dan laut terutama berasal dari darat, yaitu kegiatan industri, rumah tangga, dan pertanian. Sumber pencemaran juga berasal dari berbagai kegiatan di laut, terutama dari kegiatan perhubungan laut dan kapal pengangkut minyak serta kegiatan pertambangan. Sementara itu, praktik-praktik penangkapan ikan yang merusak dan ilegal (*illegal fishing*) serta penambangan terumbu karang masih marak terjadi yang memperparah kondisi habitat ekosistem pesisir dan laut.

Minimnya riset teknologi kelautan dan penerapannya untuk mendukung pembangunan kelautan nasional, termasuk riset sumber daya kelautan di laut dalam. Lemahnya sinergi kebijakan Iptek nasional, termasuk kelautan, menyebabkan kegiatan Iptek belum sanggup memberikan hasil yang signifikan. Kebijakan bidang pendidikan, industri, dan Iptek belum terintegrasi sehingga mengakibatkan kapasitas yang tidak termanfaatkan pada sisi penyedia, tidak berjalannya sistem transaksi, dan belum tumbuhnya permintaan dari sisi pengguna yaitu industri kelautan dan perikanan.



Di samping itu, kebijakan fiskal juga dirasakan belum kondusif bagi pengembangan kemampuan Iptek kelautan dan perikanan.

1.2.3.3 Strategi dan Arah Kebijakan

Berdasarkan isu dan permasalahan di atas, arah kebijakan pembangunan kelautan berdimensi kepulauan adalah: (1) meningkatkan sinergitas antar sektor/daerah/pemangku kepentingan dalam pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya kelautan dan pulau-pulau kecil; (2) meningkatkan pemahaman terhadap konsep negara kepulauan bagi generasi muda dan masyarakat luas; (3) Meningkatkan pengawasan dan pengendalian pelanggaran di laut; (4) meningkatkan pengamanan, menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI; (5) meningkatkan pembangunan ekonomi kelautan yang terfokus dan terintegrasi untuk sektor-sektor strategis untuk mendorong peningkatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, termasuk membangun industri maritim; (6) meningkatkan sarana dan prasarana penghubung antarpulau dalam rangka menjadikan laut sebagai perekat NKRI; (7) meningkatkan upaya pelestarian lingkungan pesisir dan laut dalam rangka menjaga dan mempertahankan fungsinya sebagai pendukung kehidupan.

1.2.4 Perlindungan Anak

1.2.4.1 Kondisi Umum

Pembangunan perlindungan anak ditujukan untuk memenuhi hak-hak anak Indonesia. Sesuai dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, perlindungan anak mencakup anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, dan meliputi hak-hak anak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi dalam berbagai aspek kehidupan, serta mendapat perlindungan dari berbagai tindak kekerasan, perdagangan anak, eksploitasi, dan diskriminasi. Dengan demikian, pemenuhan hak-hak anak mencakup setiap bidang pembangunan. Pembangunan perlindungan anak yang terintegrasi dan komprehensif akan menghasilkan kebijakan publik yang lebih efektif dalam mewujudkan dunia yang layak bagi seluruh anak Indonesia, baik laki-laki maupun perempuan.

Keberhasilan pembangunan perlindungan anak dalam memenuhi hak tumbuh kembang dan kesejahteraan anak telah ditunjukkan dalam capaian pembangunan di bidang kesehatan dan pendidikan. Selain itu, persentase pekerja anak usia 10-14 tahun telah menunjukkan penurunan, dari 5,52 persen pada tahun 2005 menjadi 4,65 persen pada tahun 2006 dan 3,78 persen pada tahun 2007 (Sakernas, 2006—2008). Sementara itu, dalam memenuhi hak sipil anak untuk mendapatkan identitas dan legalitas kependudukan, data Supas 2005 menunjukkan bahwa sebanyak 42,82 persen anak usia 0-4 tahun telah memiliki akta kelahiran.

Selanjutnya, dalam rangka melindungi anak dari segala bentuk kekerasan, telah

tersedia Unit Pelayanan Perempuan dan Anak di Kantor Kepolisian Resort (Polres), yang menyediakan pelayanan untuk anak korban kekerasan, bekerja sama dengan berbagai lembaga masyarakat, rumah sakit, dan lembaga pelayanan sosial. Dalam rangka pelayanan tersebut, telah pula dikembangkan mekanisme pengaduan bagi anak melalui telepon yang disebut Telepon Sahabat Anak (TESA) 129 di tujuh kota. Di samping itu, telah terbentuk pula gugus tugas pada tingkat nasional penanganan anak korban perdagangan orang, yang berfungsi untuk mengoordinasikan dan mendorong pemberantasan perdagangan orang termasuk perdagangan anak. Selain itu, telah disusun pula standar prosedur operasional pemulangan korban perdagangan anak, baik dari dalam wilayah RI maupun lintas batas negara. Hal ini dilakukan baik di dalam negeri, maupun antarnegara.

Di bidang kesejahteraan sosial, telah tersedia pula pelayanan untuk mengatasi masalah anak jalanan di berbagai kota, termasuk pendidikan, pendidikan keterampilan, dan upaya untuk meningkatkan kondisi ekonomi orang tua mereka agar anak-anak jalanan dan orang tuanya tetap dapat hidup bersama dalam keluarga yang harmonis. Sementara itu, untuk meningkatkan perlindungan bagi anak yang berhadapan dengan hukum, telah ditanda-tangani Surat Keputusan Bersama antara Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Sosial, Kepolisian Negara, Kejaksaan Agung, dan Mahkamah Agung.

Peraturan perundang-undangan sebagai basis hukum dalam perlindungan anak juga telah mencatat kemajuan dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Di samping itu, telah ditetapkan pula Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terkait pemidanaan terhadap pornografi anak, dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.

1.2.4.2 Permasalahan dan Sasaran

Permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan perlindungan anak adalah sebagai berikut. *Pertama*, meningkatkan akses terhadap layanan pemenuhan hak tumbuh kembang anak, termasuk pengembangan anak usia dini yang holistik dan integratif. Pada tahun 2008, jumlah anak usia dini (0-6 tahun) di Indonesia sangat besar, yaitu sekitar 29,3 juta atau 12,8 persen dari total penduduk. Permasalahan yang masih dihadapi oleh kelompok umur tersebut adalah belum optimalnya pemenuhan kebutuhan esensial anak yang mencakup kesiapan belajar dalam memasuki jenjang sekolah dasar, derajat kesehatan dan gizi anak, serta pengasuhan dan perlindungan anak. Di bidang pendidikan, data Depdiknas pada tahun 2008

menunjukkan bahwa 49,38 persen anak usia 0-6 tahun belum mengenyam program pendidikan anak usia dini. Di samping itu, masih banyak anak yang tidak bersekolah yang disebabkan oleh berbagai faktor, terutama karena kemiskinan.

Rendahnya pemenuhan hak tumbuh kembang anak, antara lain, juga ditunjukkan dengan masih tingginya jumlah pekerja anak, terutama di perdesaan, termasuk yang melakukan berbagai pekerjaan yang berbahaya, seperti menjadi pembantu rumah tangga (PRT). Dari 2,6 juta pembantu rumah tangga (PRT), 35 persennya adalah anak-anak, khususnya anak perempuan, dengan rata-rata jumlah jam kerja 25-45 jam/minggu (KNPP, 2006). Di samping itu, masih banyak pula anak-anak yang melakukan pekerjaan berbahaya di sektor transportasi, konstruksi, dan pertambangan.

Di bidang kesehatan, masih tingginya kematian bayi dan balita juga disebabkan oleh peningkatan infeksi HIV dan AIDS. Dampak hal tersebut terhadap anak, di antaranya, adalah kehilangan pengasuhan karena orang tua meninggal dunia, kehilangan sumber daya ekonomi karena biaya pengobatan yang relatif mahal, dan risiko menghadapi akibat-akibat infeksi itu dalam dirinya sendiri. Sementara itu, rendahnya tingkat pemahaman akan kesehatan reproduksi, antara lain, ditunjukkan dengan masih tingginya perempuan yang *median* usia kawin pertamanya sampai dengan 18 tahun, yaitu 46,87 persen. Angka ini lebih tinggi di perdesaan, yaitu sebesar 53,95 persen dibandingkan dengan di perkotaan, yaitu 37,16 persen (Susenas, 2007).

Dalam pemenuhan hak-hak sipil, jumlah anak yang belum mendapatkan akta kelahiran masih tinggi, yaitu sekitar 57,18 persen. Hal ini, antara lain, disebabkan oleh: (a) belum adanya keseragaman sistem pencatatan kelahiran; (b) tingkat kompleksitas persyaratan pengurusannya; (c) adanya inkonsistensi aturan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dengan Undang-Undang Administrasi Kependudukan mengenai jangka waktu pembebasan biaya pengurusan akta kelahiran (dari 487 kabupaten/kota, hanya 219 kabupaten/kota yang sudah membebaskan biaya pengurusan akta kelahiran); (d) terbatasnya tempat pelayanan pencatatan kelahiran (hanya tersedia sampai tingkat kabupaten/kota); dan (e) belum adanya insentif dari kepemilikan akta kelahiran. Dengan demikian, maka tantangan yang harus dihadapi ke depan adalah meningkatkan koordinasi pelaksanaan dan sinkronisasi kebijakan yang terkait dengan kualitas tumbuh kembang dan kelangsungan hidup anak.

Kedua, meningkatkan perlindungan anak dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Data Susenas 2006 menunjukkan bahwa prevalensi kekerasan terhadap anak adalah sebesar 7,6 persen, atau terdapat sekitar 4 juta anak yang mengalami kekerasan setiap tahun. Sementara itu, data Bareskrim POLRI menunjukkan bahwa dalam periode tahun 2004 sampai dengan Oktober 2009 terdapat 538 anak dari 1,722 korban perdagangan orang, yang sebagian besar adalah perempuan. Perdagangan anak biasanya ditujukan untuk menjadi pembantu rumah tangga, pekerja seks komersial atau pengemis di jalan, pengedar narkoba, dieksploitasi di tempat-tempat kerja berbahaya seperti *jermal*, pertambangan, dan perkebunan. Di samping itu, masih banyak pula anak-

anak pengungsi korban konflik atau bencana alam yang belum memperoleh hak-hak dasar, termasuk pengasuhan alternatif yang memadai (WHO, 2006; Depsos, *Save the Children*, 2006). Kondisi tersebut, antara lain, disebabkan oleh masih banyaknya rumah tangga yang hidup di bawah garis kemiskinan, masih terdapatnya nilai-nilai budaya yang permisif terhadap kekerasan dan eksploitasi anak, masih lemahnya penegakan hukum, dan belum terbentuknya mekanisme dan struktur perlindungan anak yang komprehensif sampai pada tingkatan masyarakat. Dengan demikian, maka tantangan kedua yang harus dihadapi adalah meningkatkan koordinasi pelaksanaan dan penegakan hukum yang terkait dengan perlindungan bagi anak terhadap segala bentuk kekerasan dan diskriminasi.

Ketiga, meningkatkan kapasitas kelembagaan perlindungan anak. Belum efektifnya pelaksanaan perlindungan anak, antara lain, ditunjukkan dengan: (1) masih terdapatnya peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang tidak konsisten dengan KHA dan Undang-Undang Perlindungan Anak yang berpotensi merugikan dan menghambat pemenuhan hak-hak anak; dan (2) belum terbentuknya kelembagaan perlindungan anak yang komprehensif dan menjangkau semua wilayah, serta (3) masih lemahnya mekanisme pengawasan dan pendataan. Hal ini ditunjukkan dengan masih rendahnya pencapaian pembangunan perlindungan anak yang, antara lain, disebabkan oleh masih lemahnya kualitas dan kapasitas kelembagaan. Hingga saat ini, belum ada mekanisme komprehensif yang berlaku dari pusat ke daerah, yang ditujukan untuk melindungi anak. Mekanisme yang ada masih bersifat sektoral dan belum memadai sehingga belum dapat menciptakan lingkungan yang aman bagi anak, dan belum memberikan wadah bagi setiap anggota masyarakat, termasuk anak-anak, untuk berpartisipasi dalam upaya pemenuhan hak anak. Di samping itu, sistem pengelolaan data dan informasi serta indeks komposit perlindungan anak yang terpilah, yang mutakhir dan mudah diakses, juga belum tersedia. Dengan demikian, maka tantangan ketiga yang harus dihadapi adalah meningkatkan kapasitas kelembagaan, ketersediaan data dan informasi, koordinasi pelaksanaan, dan harmonisasi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perlindungan anak.

Sasaran Bidang. Dengan memperhatikan permasalahan dan tantangan tersebut di atas, maka sasaran bidang perlindungan anak adalah meningkatnya tumbuh kembang optimal, kesejahteraan, dan perlindungan anak yang ditandai dengan: (a) meningkatnya akses dan kualitas layanan perlindungan anak, yang antara lain diukur dengan meningkatnya APK PAUD, APS 7—12 tahun, APS 13—15 tahun, dan cakupan kunjungan neonatal, serta menurunnya persentase balita gizi buruk yang mendapat perawatan; (b) meningkatnya persentase cakupan anak korban kekerasan yang mendapat penanganan pengaduan; dan (c) meningkatnya efektivitas kelembagaan perlindungan anak, baik di tingkat nasional maupun daerah.

1.2.4.3 Strategi dan Arah Kebijakan

Berdasarkan uraian di atas, kebijakan peningkatan perlindungan anak diarahkan



pada: (a) peningkatan akses terhadap pelayanan yang berkualitas, peningkatan partisipasi anak dalam pembangunan, dan upaya menciptakan lingkungan yang ramah anak dalam rangka mendukung tumbuh kembang dan kelangsungan hidup anak; (b) peningkatan perlindungan anak dari kekerasan dan diskriminasi; dan (c) peningkatan efektivitas kelembagaan perlindungan anak.

Dalam rangka mencapai arah kebijakan tersebut, perlindungan anak dilaksanakan melalui tiga fokus prioritas. *Pertama*, peningkatan kualitas tumbuh kembang dan kelangsungan hidup anak, antara lain, melalui peningkatan aksesibilitas dan kualitas program pengembangan anak usia dini; peningkatan kualitas kesehatan anak; dan peningkatan pendidikan kesehatan reproduksi bagi remaja.

Kedua, perlindungan anak dari segala bentuk tindak kekerasan dan diskriminasi, antara lain melalui: peningkatan rehabilitasi dan perlindungan sosial anak; peningkatan perlindungan bagi pekerja anak dan penghapusan pekerja terburuk anak; dan peningkatan perlindungan bagi anak yang berhadapan dengan hukum. *Ketiga*, peningkatan kapasitas kelembagaan perlindungan anak, antara lain, melalui penyusunan dan harmonisasi peraturan perundang-undangan terkait perlindungan anak; peningkatan kapasitas pelaksana perlindungan anak; peningkatan penyediaan data dan informasi perlindungan anak; dan peningkatan koordinasi dan kemitraan antarpemangku kepentingan terkait pemenuhan hak-hak anak, baik lokal, nasional, maupun internasional.

**RENCANA TINDAK PRIORITAS LINTAS BIDANG
PENANGGULANGAN KEMISKINAN**

Visi/Goal : Peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat miskin
 Sasaran Pokok : Penurunan tingkat kemiskinan
 Indikator : Jumlah penduduk di bawah garis kemiskinan
 Target : 8-10% pada akhir 2014

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN STRATEGIS (OUTCOME, OUTPUT YANG DIHARAPKAN)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN / LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014			
	Prioritas: Penanggulangan Kemiskinan	Outcomes: Meningkatnya pemenuhan pelayanan dasar dan kualitas kebijakan PK (<i>affirmative policy</i>)						
I.	Fokus Prioritas: Peningkatan dan Penyempurnaan Kualitas Kebijakan Perlindungan Sosial Berbasis Keluarga							
1.	Pembinaan, Pengembangan Pembiayaan dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan	Terumuskannya kebijakan pembiayaan dan jaminan kesehatan	Persentase Penduduk (termasuk seluruh penduduk miskin) yang memiliki jaminan kesehatan	59	100	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Kemenkes	842,40
2.	Pelayanan Kesehatan Dasar Bagi Masyarakat Miskin (Jamkesmas)	Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Dasar Bagi Penduduk Miskin di Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang memberikan pelayanan kesehatan dasar bagi penduduk miskin	8.481	9.000	Pembinaan Upaya Kesehatan	Kemenkes	6.447,20
3.	Pelayanan Kesehatan Rujukan Bagi Masyarakat Miskin (Jamkesmas)	Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Rujukan Bagi Penduduk Miskin di RS	Persentase RS yang melayani pasien miskin peserta program Jamkesmas	75	95	Pembinaan Upaya Kesehatan	Kemenkes	24.782,70
4.	Pengembangan Kebijakan dan Pembinaan Kesetaraan ber-KB	Meningkatnya pembinaan, kesetaraan, dan kemandirian ber-KB melalui 23.500 klinik pemerintah dan swasta	1. Jumlah peserta KB baru miskin (KPS dan KS-I) dan rentan lainnya yang mendapatkan pembinaan dan alokasi gratis melalui 23.500 klinik pemerintah dan swasta (juta)	3,75	19,28 ^{KJ}	Program Kependudukan dan Keluarga Berencana	BKKBN	4.378,15

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN STRATEGIS (OUTCOME, OUTPUT YANG DIHARAPKAN)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN / LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014			
			2. Jumlah peserta KB aktif miskin (KPS dan KS-1) dan rentan lainnya yang mendapatkan pembinaan dan alokasi gratis melalui 23.500 klinik KB pemerintah dan swasta (juta)	11,9	62,5 ^{K)}			
5.	Peningkatan Kemandirian Ber-KB Keluarga Pra-S dan KS-1 ¹⁾	Meningkatnya pembinaan dan kemandirian ber-KB keluarga Pra-S dan KS-1	1. Jumlah PUS anggota kelompok usaha ekonomi produktif yang menjadi peserta KB mandiri 2. Jumlah mitra kerja yang memberikan bantuan modal dan pembinaan kewirausahaan kepada kelompok usaha ekonomi produktif 3. Jumlah mitra kerja yang menjadi pendamping kelompok usaha ekonomi produktif	22.000 34 3	330.000 ^{K)} 170 ^{K)} 15 ^{K)}	Program Keluarga Berencana Nasional	BKKBN	135,72
6.	Kegiatan Penyediaan Subsidi Pendidikan SD/SDLB Berkualitas ¹⁾	Tersalurkannya subsidi pendidikan bagi siswa SD/SDLB	Jumlah siswa SD/SDLB sasaran beasiswa miskin	2.767.282	3.103.210	Program Pendidikan Taman Kanak-kanak dan Pendidikan Dasar	Kemendiknas	59.599,10
7.	Kegiatan Penyediaan Subsidi Pendidikan SMP/SMPLB ¹⁾	Tercapainya keluasan dan pemerataan akses SMP bermutu dan berkesetaraan gender di semua kabupaten dan kota	Jumlah siswa SMP/SMPLB sasaran beasiswa miskin	966.064	1.195.700	Program Pendidikan Taman Kanak-kanak dan Pendidikan Dasar	Kemendiknas	31.512,20
8.	Kegiatan Penyediaan dan Peningkatan Pendidikan SMA ¹⁾	Tercapainya perluasan dan pemerataan akses pendidikan SMA bermutu, berkesetaraan gender, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat di semua kabupaten dan kota	Jumlah siswa SMA sasaran beasiswa miskin	378.783	800.000	Program Pendidikan Menengah	Kemendiknas	6.530,60
9.	Kegiatan Penyediaan dan Peningkatan Pendidikan SMK ¹⁾	Tercapainya perluasan dan pemerataan akses pendidikan SMK bermutu, berkesetaraan gender dan relevan dengan kebutuhan masyarakat, di semua kabupaten dan kota	Jumlah siswa SMK sasaran beasiswa miskin	305.535	645.298	Program Pendidikan Menengah	Kemendiknas	9.243,00
10.	Penyediaan Layanan Kelembagaan ¹⁾	Tersedianya keluasan dan pemerataan akses PT yang bermutu dan berdaya saing internasional	Jumlah mahasiswa penerima beasiswa miskin	65.000	70.000	Program Pendidikan Menengah	Kemendiknas	5.211,30

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN STRATEGIS (OUTCOME, OUTPUT YANG DIHARAPKAN)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN / LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014			
11.	Penyediaan Subsidi Pendidikan Madrasah Bermutu ¹⁾	Tersedianya beasiswa miskin MI, MTs, MA	1. Jumlah siswa miskin penerima beasiswa miskin MI	640.000	640.000	Program Pendidikan Islam	Kemenpag	1.152,00
			2. Jumlah siswa miskin penerima beasiswa miskin MTs	540.000	540.000			1.944,00
			3. Jumlah siswa miskin penerima beasiswa miskin MA	320.000	320.000			1.216,00
12.	Penyediaan Subsidi Pendidikan Tnggi Islam/	Tersedianya beasiswa mahasiswa miskin	Jumlah mahasiswa miskin penerima beasiswa PTA	59.538	59.538	Program Pendidikan Islam	Kemenpag	788,50
13.	Bantuan Tunai Bersyarat	Terlaksananya pemberian bantuan Tunai Bersyarat bagi RTSM (PKH)	Jumlah RTSM yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/PKH (RTSM)	816.000	4.506.000 ^{K)}	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Kemensos	8.985,00
14.	Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial Anak	Terlaksananya pelayanan, perlindungan dan rehabilitasi sosial bagi anak dan balita telantar, anak jalanan, anak cacat, anak berhadapan	Jumlah anak dan balita telantar, anak jalanan, anak cacat dan anak berhadapan dengan hukum, dan anak yang membutuhkan	159.500	26.300	Program Rehabilitasi Sosial	Kemensos	1.717,11
15.	Pelayanan Sosial Lanjut Usia	Terlaksananya pelayanan, perlindungan dan rehabilitasi sosial bagi lanjut usia telantar	Jumlah lanjut usia telantar yang berhasil dilayani, dilindungi dan direhabilitasi baik di dalam maupun di luar panti (jiwa)	22.040	51.420	Program Rehabilitasi Sosial	Kemensos	635,06
16.	Rehabilitasi dan Perlindungan Penyandang Cacat	Terlaksananya pelayanan, perlindungan dan rehabilitasi sosial bagi penyandang cacat	Jumlah penyandang cacat yang berhasil dilayani, dilindungi dan direhabilitasi baik di dalam maupun di luar panti (jiwa)	34.900	75.640	Program Rehabilitasi Sosial	Kemensos	1.293,72
17.	Bantuan Sosial Korban Bencana Alam	Terpenuhinya kebutuhan darurat dan pelayanan sosial bagi korban bencana alam	Jumlah korban bencana alam yang berhasil dibantu dan dilayani (jiwa)	40.000	247.900 ^{K)}	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Kemensos	2.340,22
18.	Bantuan Sosial Korban Bencana Sosial	Terpenuhinya kebutuhan darurat dan pelayanan sosial bagi korban bencana sosial	Jumlah korban bencana sosial yang berhasil dibantu dan dilayani (jiwa)	43.000	266.900 ^{K)}	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Kemensos	945,12
19.	Penanggulangan Kemiskinan	Terselurkannya bantuan pemberdayaan masyarakat bagi fakir miskin dalam bentuk KUBE dan stimulan UEP	Tersedianya akses kesempatan kerja dan berusaha, pelayanan kesehatan dasar dan pendidikan dasar melalui KUBE (kelompok)	12.793	80.028 ^{K)}	Program Pemberda-yaan Sosial	Kemensos	2.701,17
			Tersedianya akses perumahan dan permukiman melalui Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (unit)	6.150	38.420 ^{K)}			

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN STRATEGIS (OUTCOME, OUTPUT YANG DIHARAPKAN)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN / LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014			
20.	Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT)	Terpenuhinya kebutuhan dasar, aksesibilitas dan pelayanan sosial dasar bagi warga KAT	Tersedianya permukiman dan infrastruktur (unit)	2.300	3.720	Program Pemberda-yaan Sosial	Kemensos	738,19
			Pemberian jaminan hidup (KK)	4.270	7.010			
21.	Penyediaan subsidi beras untuk masyarakat miskin (RASKIN)	Penyediaan beras untuk seluruh rumah tangga sasaran dengan jumlah yang memadai dalam 1 tahun	Jumlah RTS penerima RASKIN (dengan 15 kg per RTS selama 12 bulan)	17.500.000		Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Kemenko Kesra/ Perum Bulog	11.800,00
22.	Pengelolaan Pertanahan Provinsi	Terwujudnya redistribusi tanah	Terlaksananya redistribusi tanah (bidang)	210.000	1.050.000 ^{ks)}	Program Pengelolaan Pertanahan Nasional	BPN	912,70
23.	Pengembangan dan Peningkatan Perluasan Kesempatan Kerja	Tersedianya pekerjaan untuk sementara waktu bagi penganggur dan terbangunnya sarana fisik yang dibutuhkan masyarakat	1. Jumlah penganggur yang mempunyai pekerjaan sementara (orang)	24.000	384.000 ^{ks)}	Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja	Kemenakertrans	856,73
			2. Jumlah kabupaten/kota yang menyelenggarakan program pengurangan pengangguran sementara (kab/kota)	231	360			
24.	Peningkatan Perlindungan Pekerja Perempuan dan Penghapusan Pekerja Anak	Memfasilitasi pekerja anak untuk kembali ke dunia pendidikan atau memperoleh pelatihan keterampilan - Berkurangnya jumlah anak yang bekerja pada bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak	1. Jumlah pekerja anak yang ditarik dari BPTA	3.000	28.200 ^{ks)}	Program perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembangan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan	Kemenakertrans	212,10
			2. Persentase pekerja anak yang ditarik dari BPTA yang dikembalikan ke dunia pendidikan dan/atau memperoleh pelatihan keterampilan	100	100			

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN STRATEGIS (OUTCOME, OUTPUT YANG DIHARAPKAN)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN / LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014			
II.	Fokus Prioritas: Menyempurnakan dan Meningkatkan Efektivitas Pelaksanaan PNPB Mandiri							
25.	Pengaturan, Pembinaan, dan Pengawasan dalam Penataan Bangunan dan Lingkungan Termasuk Pengelolaan Gedung dan Rumah Negara serta Penyelenggaraan Bangunan Gedung dan Penataan Kawasan/Lingkungan Permukiman	Pemberdayaan masyarakat dan percepatan penanggulangan kemiskinan & pengangguran di kelurahan/ kecamatan (PNPM Perkotaan)	Jumlah kelurahan/desa yang mendapatkan pendampingan pemberdayaan sosial	8.500	482	Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Kemen. PU	5.980,00
26.	Peningkatan Kemandirian Masyarakat Perdesaan (PNPM-MP)	Pemberdayaan masyarakat dan percepatan penanggulangan kemiskinan & pengangguran di kecamatan dan desa/(PNPM-Perdesaan)	1. Cakupan penerapan PNPB-MP dan Penguatan PNPB (kec)	4.791	4.949	Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	Kemendagri	48.781,30
			2. Cakupan wilayah kegiatan rekonstruksi dan rehabilitasi pasca bencana krisis di Kab. Nias dan Nias Selatan (kecamatan)	9	-			39,80
27.	Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan dan Penyelenggaraan dalam Pengembangan Permukiman	237 kecamatan (RISE)	1. Jumlah kecamatan yang dilayani oleh infrastruktur pendukung kegiatan ekonomi dan sosial	237	237	Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Kemen. PU	1.188,00
		Percepatan penanggulangan kemiskinan melalui pembangunan infrastruktur & pemberdayaan masyarakat desa (RIS PNPB+PPIP)	2. Jumlah desa tertinggal yang terbangun prasarana dan sarana lingkungan permukiman	3.900	1.226			3.198,00
28.	Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, Pengembangan Sumber Pembiayaan dan Pola Investasi, serta Pengelolaan Pengembangan Sanitasi Lingkungan	210 kab/kota (SANIMAS)	Pembangunan prasarana dan sarana air limbah dengan sistem <i>on-site</i> (kab/kota)	30	210 ^{ki}	Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Kemen. PU	331,00
29.	Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, Pengembangan Sumber Pembiayaan dan Pola Investasi, serta Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	4.650 desa (PAMSIMAS)	Jumlah desa yang terfasilitasi	1.472	4.650 ^{ki}	Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Kemen. PU	4.224,00

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN STRATEGIS (OUTCOME, OUTPUT YANG DIHARAPKAN)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN / LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014			
30.	Pelayanan Usaha dan Pemberdayaan Masyarakat	Meningkatnya keberdayaan dan kemandirian 2 juta usaha skala mikro di seluruh kawasan minapolitan pesisir, beroperasinya sarana usaha mikro di 300 kabupaten/kota pesisir	Jumlah kelompok usaha mikro di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang <i>bankable</i> 1. Pengembangan sarana usaha mikro LKM (unit) 2. Dana Pemberdayaan Masyarakat Desa/PNPM MK (kab/kota) 3. Tenaga pendamping (orang) 4. Kelompok Usaha Mikro (usaha)	100 120 480 800.000	100 120 480 800.000	Program Pengelolaan Sumber Daya Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	KKP	1.300,61
31.	Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) dan Penguatan Kelembagaan Ekonomi Perdesaan melalui LM3	Peningkatan realisasi penyaluran kredit program (KKP-E dan KUR), pembiayaan komersial, pembiayaan syariah, pengembangan sentra usaha pertanian perdesaan, dan pengembangan Gapoktan PUAP	1. Realisasi penyaluran kredit program untuk pertanian (KKP-E dan KUR) (triliun) 2. Realisasi penyaluran pembiayaan Syariah dan pembiayaan komersial untuk sektor pertanian (triliun) 3. Jumlah sentra-sentra usaha pertanian di perdesaan 4. Jumlah Gapoktan PUAP (unit)	1,5 4 200 10.000	2,5 8 200 10.000	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Kementan	4.500,01
32.	Pengembangan Kebijakan, Koordinasi dan Fasilitasi Penguatan Kelembagaan Pemerintah Daerah Tertinggal (P2DTK/SPADA) – PNPMD ²⁾	Meningkatnya pemulihan dan pertumbuhan sosial ekonomi daerah-daerah tertinggal	Jumlah kab, kec dan desa daerah tertinggal	51	80	Program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal	KPDT	2.491,09
33.	Peningkatan PNPMD Mandiri Bidang Pariwisata	Meningkatnya jumlah desa wisata melalui PNPMD bidang pariwisata	Jumlah desa wisata	200	350	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Kemenbudpar	406,00
III.	Fokus Prioritas: Peningkatan Akses Usaha Mikro dan Kecil kepada Sumberdaya Produktif	Meningkatnya jangkauan dan jenis sumberdaya produktif yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan usaha koperasi dan UMKM	a. Jumlah koperasi dan UMKM yang memanfaatkan sumberdaya finansial dan non-finansial b. Jumlah bank dan lembaga keuangan non-bank yang melayani nasabah koperasi c. Volume kredit/pembiayaan yang disalurkan bank dan lembaga keuangan bukan bank untuk koperasi dan UMKM.					

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN STRATEGIS (OUTCOME, OUTPUT YANG DIHARAPKAN)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN / LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014			
34.	Dukungan Penjaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR)	Tersedianya anggaran penjaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR)	Persentase tersedianya anggaran penjaminan KUR	100	100	Program Penempatan Modal Negara Dalam Rangka Mendukung Program KUR	Kemenkeu (Anggaran 99)	10.000,00
35.	Koordinasi Kebijakan Kredit Usaha Rakyat (KUR)	Meningkatnya koordinasi kebijakan Kredit Usaha Rakyat (KUR)	Persentase rekomendasi kebijakan KUR yang terimplementasikan	60	80	Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perencanaan	Menko Perekonomian	3,10
36.	Pemasarakatan dan pembinaan kewirausahaan dan budaya usaha bagi masyarakat, termasuk usaha skala mikro dan kecil.	Terselenggara-nya pemasarakatan dan pembinaan kewirausahaan dan budaya usaha bagi masyarakat, termasuk usaha skala mikro dan kecil.	1. Jumlah peserta pemasarakatan kewirausahaan (orang)	2.000	10.000 ^{ki}	Pemberdayaan Koperasi dan UMKM	Kemeneq KUKM	13,60
			2. Jumlah pelaku usaha koperasi dan UMKM peserta diklat kewirausahaan (orang)		6.000 ^{ki}			8,16
37.	Revitalisasi sistem pendidikan, pelatihan dan penyuluhan perkoperasian bagi anggota dan pengelola koperasi, serta calon anggota dan kader koperasi.	Sistem pendidikan, pelatihan dan penyuluhan perkoperasian bagi anggota dan pengelola koperasi, serta calon anggota dan kader koperasi semakin efektif.	1. Jumlah peserta peningkatan pemahaman koperasi di kalangan masyarakat kelompok strategis (orang)	1.000	5.000 ^{ki}	Pemberdayaan Koperasi dan UMKM	Kemeneq KUKM	2,50
			2. Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan peningkatan pemahaman koperasi pada SDM koperasi (orang)	-	7.000 ^{ki}			6,00
38.	Dukungan pengenalan teknologi bagi usaha skala mikro dan kecil, tidak terkecuali bagi sektor informal.	a. Tersedianya dukungan pengenalan teknologi bagi usaha skala mikro dan kecil, tidak terkecuali bagi sektor informal.	1. Jumlah teknologi tepat guna yang dikenalkan kepada usaha mikro dan kecil (paket kegiatan)	-	20 ^{ki}	Pemberdayaan Koperasi dan UMKM	Kemeneq KUKM	10,00
			2. Jumlah usaha mikro dan kecil yang menerima dukungan teknologi tepat guna (UMKM)	350	1.750 ^{ki}			11,75
		b. Terpromosinya KUKM yang memiliki produk berkualitas	Pengembangan dan Pelayanan Bisnis KUKM melalui Trading Board (KUKM)	3.000	15.000 ^{ki}	6,00		

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN STRATEGIS (OUTCOME, OUTPUT YANG DIHARAPKAN)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN / LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014			
39.	Perluasan pelayanan kredit/ pembiayaan bank bagi koperasi dan UMKM, yang didukung pengem-bangan sinergi dan kerja sama dengan lembaga keuangan/ pembiayaan lainnya.	Meningkatnya jangkauan pelayanan kredit/pembiayaan bank bagi koperasi dan UMKM.	1. Kerja sama pembiayaan yang melibatkan bank dan lembaga keuangan/ pembiayaan lainnya (MOU)	5	25 ^{KJ}	Pemberdayaan Koperasi dan UMKM	Kemeneq KUKM	8,15
			2. Terfasilitasi-nya Lembaga Penjaminan Kredit Daerah (LPKD) yang melakukan co-guarantee dengan lembaga penjaminan nasional (Prov)	8	33 ^{KJ}			15,70
			3. Jumlah Koperasi yang dapat mengakses kredit/ pembiayaan bank melalui linkage	100	500 ^{KJ}			1,75
			4. Jumlah LKM (koperasi dan BPR) yang melakukan kerjasama pembiayaan dengan Bank	100	500 ^{KJ}			5,00
			5. Jumlah Lembaga Penjaminan Kredit Daerah	2	12 ^{KJ}			10,00
40.	Peningkatan peran lembaga keuangan bukan bank, seperti KSP/KJKS, perusahaan modal ventura, anjak piutang, sewa guna usaha, pegadaian, dalam mendukung pembiayaan bagi koperasi dan UMKM, disertai dengan pengem-bangan jaringan informasinya.	Meningkatnya kapasitas dan jangkauan lembaga keuangan bukan bank untuk menyediakan pembiayaan usaha bagi koperasi dan UMKM.	Jumlah lembaga pembiayaan bukan bank yang dibentuk - (KSP-KJKS)	100	500 ^{KJ}	Pemberdayaan Koperasi dan UMKM	Kemeneq KUKM	13,10
			LMVD	1	5 ^{KJ}			
41.	Peningkatan kapasitas kelembagaan dan kualitas layanan lembaga keuangan mikro (LKM), termasuk untuk akreditasi dan sertifikasi pelayanan LKM, termasuk LKM yang berbadan hukum koperasi.	1. Meningkatnya kapasitas kelembagaan LKM. 2. Meningkatnya kapasitas dan kualitas layanan LKM	Jumlah LKM yang terdaftar dan terakreditasi sesuai ketentuan hukum tentang LKM.	100	500 ^{KJ}	Pemberdayaan Koperasi dan UMKM	Kemeneq KUKM	2,50
			1. Jumlah pengelola LKM yang mengikuti pelatihan.		4.000 ^{KJ}			4,00
			2. Jumlah SDM Pengelola KSP/KJKS yang bersertifikat (orang)	1.200	6.000 ^{KJ}			5,00
			3. Jumlah LDP KJK dan TUK yang diperkuat (unit)		8 ^{KJ}			6,00
			4. Jumlah Manajer/kepala cabang KJK yang diikutkan diklat dan sertifikasi kompetensi LKM (orang)	900	4.500 ^{KJ}			5,00

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN STRATEGIS (OUTCOME, OUTPUT YANG DIHARAPKAN)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN / LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014			
42.	Peningkatan peran Pemda, BUMN dan lembaga swadaya masyarakat dalam penyediaan dukungan pembiayaan bagi koperasi dan UMKM, yang didukung penelarasannya dengan program-program pembiayaan nasional bagi koperasi dan UMKM	1. Meningkatnya penyediaan pembiayaan bagi koperasi dan UMKM yang didukung peran Pemda, BUMN dan lembaga swadaya masyarakat.	1. Meningkatnya penyediaan pembiayaan bagi koperasi dan UMKM yang didukung peran Pemda, BUMN dan lembaga swadaya masyarakat (Provinsi)	7	33 ^{K)}	Pemberdayaan Koperasi dan UMKM	Kemeneq KUKM	5,00
			2. Jumlah UMKM yang diseleksi untuk mendapatkan pembiayaan melalui sertifikasi tanah		80.000 ^{K)}			14,00
			3. Persentase UMKM yang dibina setelah mendapatkan sertifikasi tanah	20	15			1,50
		2. Meningkatnya Jumlah koperasi dan UMKM yang sudah memanfaatkan pembiayaan yang disediakan melalui dukungan/ program Pemda, BUMN (PKBL), CSR dan lembaga swadaya masyarakat.	Jumlah koperasi dan UMKM yang sudah memanfaatkan pembiayaan yang disediakan melalui dukungan/program Pemda, BUMN (PKBL), CSR dan lembaga swadaya masyarakat	50	250 ^{K)}	Pemberdayaan Koperasi dan UMKM	Kemeneq KUKM	7,50
		- Jumlah UMKM	500	2.500 ^{K)}				
43.	Penyediaan skim-skim pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan dan kapasitas usaha mikro, seperti dana bergulir, bantuan sosial tanggung renteng, dan sistem penjaminan kredit.	Tersedianya skim-skim pembiayaan khusus yang sesuai dengan kebutuhan dan kapasitas usaha mikro.	Jenis-jenis skim pembiayaan khusus bagi usaha mikro (jenis skim)	5	25 ^{K)}	Pemberdayaan Koperasi dan UMKM	Kemeneq KUKM	25,00
			Pelaku usaha mikro/keperasi yang mendapatkan bantuan dana	2.600	7.900 ^{K)}			395,00
III.	Fokus Prioritas: Peningkatan Sinkronisasi dan Efektivitas Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan serta Harmonisasi antar Pelaku	Outcomes: Menigkatnya efektifitas pelaksanaan program PK di daerah						
44.	Koordinasi Pengarusutamaan Kebijakan dan Anggaran Penanggulangan Kemiskinan	Meningkatnya jumlah koordinasi, sinkronisasi, kajian serta pemantauan dan evaluasi kebijakan penanggulangan kemiskinan di bidang pengarusutamaan kebijakan dan anggaran	1. Jumlah kegiatan dan koordinasi kebijakan, sinkronisasi pelaksanaan, kajian kebijakan, pemantauan dan evaluasi penanggulangan kemiskinan di bidang pengarusutamaan kebijakan dan anggaran		10	Program Koordinasi Pengembangan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Kemenko Kesra	15,14

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN STRATEGIS (OUTCOME, OUTPUT YANG DIHARAPKAN)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN / LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014			
45.	Koordinasi Penguatan Kelembagaan TKPK	Meningkatnya jumlah koordinasi, sinkronisasi, kajian serta pemantauan dan evaluasi kebijakan penanggulangan kemiskinan di bidang penguatan kelembagaan TKPK	1. Jumlah dan persentase hasil kegiatan koordinasi kelembagaan TKPK 2. Jumlah dan persentase hasil kegiatan koordinasi pengendalian pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan		12	Program Koordinasi Pengembangan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Kemenko Kesra	13,46
46.	Koordinasi Penguatan Masyarakat dan Kawasan	Meningkatnya jumlah koordinasi, sinkronisasi, kajian serta pemantauan dan evaluasi kebijakan penanggulangan kemiskinan di bidang penguatan masyarakat dan kawasan	1. Jumlah kegiatan koordinasi pelaksanaan kebijakan program pemberdayaan masyarakat 2. Jumlah sinkronisasi kebijakan program pemberdayaan masyarakat di bidang penguatan masyarakat dan kawasan		8	Program Koordinasi Pengembangan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Kemenko Kesra	7,56
47.	Koordinasi Urusan Kelembagaan dan Kemitraan	Meningkatnya jumlah koordinasi, sinkronisasi, kajian serta pemantauan dan evaluasi kebijakan penanggulangan kemiskinan di bidang kelembagaan dan kemitraan	Jumlah kegiatan dan persentase pelaksanaan rekomendasi hasil koordinasi dan sinkronisasi kebijakan penanggulangan kemiskinan di bidang kelembagaan dan kemitraan		5	Program Koordinasi Pengembangan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Kemenko Kesra	17,13
48.	Koordinasi Urusan Keuangan Mikro dan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Meningkatnya jumlah koordinasi, sinkronisasi, kajian serta pemantauan dan evaluasi kebijakan penanggulangan kemiskinan di bidang keuangan mikro dan pemanfaatan TTG	1. Jumlah pengusaha mikro yang telah mendapatkan kredit modal usaha 2. Jumlah kegiatan/lembaga hasil sinkronisasi pengembangan akses sumber pendanaan bagi usaha mikro		8	Program Koordinasi Pengembangan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Kemenko Kesra	7,10

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN STRATEGIS (OUTCOME, OUTPUT YANG DIHARAPKAN)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN / LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014			
			3. Jumlah kegiatan koordinasi pengembangan teknologi tepat guna bagi usaha mikro					
			4. Persentase pelaksanaan rekomendasi pembentukan LPDA-PK dan DME sebagai program pemberdayaan masyarakat dan usaha mikro					
TOTAL								270.005,50

Catatan:

1. ¹⁾ merupakan angka program, bukan angka kegiatan
2. ²⁾ masih merupakan usulan dari kegiatan P2DTK Fase I
3. ³⁾ Angka Kumulatif 5 Tahun (2010-2014).

**RENCANA TINDAK PRIORITAS LINTAS BIDANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH TAHUN 2010 - 2014**

KEBIJAKAN LINTAS BIDANG: Perubahan Iklim Global

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN SASARAN STRATEGIS (OUTCOME, OUTPUT YANG DIHARAPKAN)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
KEGIATAN ADAPTASI								
BIDANG SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA								
1	Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang	Meningkatnya pencegahan dan penanggulangan penyakit bersumber binatang	Angka kesakitan penderita DBD per100.000 penduduk Angka penemuan kasus Malaria per 1.000 penduduk	55 2	51 1		Kemenkes	1.254,00
BIDANG EKONOMI								
1	Koordinasi Kebijakan Ketahanan Pangan	Meningkatnya koordinasi urusan ketahanan pangan	Persentase rekomendasi hasil koordinasi kebijakan bidang ketahanan pangan yang terimplementasikan	50%	90%	Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian	KEMENKO PEREKONOMIAN / Deputi Bidang Koordinasi Pertanian Dan Kelautan (Deputi II)	19,45

KEBIJAKAN LINTAS BIDANG: Perubahan Iklim Global

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN SASARAN STRATEGIS (OUTCOME, OUTPUT YANG DIHARAPKAN)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
BIDANG SARANA DAN PRASARANA								
1	Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku	Meningkatnya layanan prasarana air baku dengan kapasitas 43.4 m3/det dan terjaganya layanan air baku dengan kapasitas 44.8 m3/det	Kapasitas air baku yang ditingkatkan sebesar 43,4 m3/det	7,6 m3/det	43,4 m3/det ^{K)}	Pengelolaan Sumber Daya Air oleh Ditjen Sumber Daya Air	Kemen. Pekerjaan Umum	5.549,40
			Kapasitas prasarana air baku yang direhabilitasi sebesar 12,3 m3/det	2,5 m3/det	12,3 m3/det ^{K)}			700,00
			Kapasitas prasarana air baku yang terjaga sebesar total 44,8 m3/det	5,5 m3/det	44,8 m3/det ^{K)}			100,01
2	Pengelolaan dan Konservasi Waduk, Embung, Situ serta Bangunan Penampung Air Lainnya	Meningkatnya ketersediaan dan terjaganya kelestarian air dengan kapasitas 21,5 m3/det	Jumlah waduk dan embung/situ yang dibangun sebanyak 12 waduk dan 158 embung/situ	1 waduk selesai dibangun; 5 waduk dalam pelaksanaan pembangunan; 20 embung/situ selesai dibangun	11 waduk dan 158 ^{K)} embung/situ selesai dibangun	Pengelolaan Sumber Daya Air oleh Ditjen Sumber Daya Air	Kemen. Pekerjaan Umum	6.481,29

KEBIJAKAN LINTAS BIDANG: Perubahan Iklim Global

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN SASARAN STRATEGIS (OUTCOME, OUTPUT YANG DIHARAPKAN)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
			Jumlah waduk, embung/situ yang direhabilitasi sebanyak 29 waduk dan 298 embung/situ	2 waduk selesai di rehabilitasi, 9 waduk dalam pelaksanaan rehabilitasi dan 37 embung/situ selesai direhabilitasi	29 waduk selesai di rehabilitasi, dan 298 embung/situ selesai direhabilitasi			1.845,26
			Jumlah waduk/embung/situ yang dioperasikan dan dipelihara sebanyak 182 waduk/embung/situ	182 waduk/embung/situ	166 ^{k)} waduk/embung/situ			1.320,00
			Jumlah kawasan sumber air yang di konservasi sebanyak 15 kawasan	9 kawasan	15 kawasan ^{k)}			645,00

KEBIJAKAN LINTAS BIDANG: Perubahan Iklim Global

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN SASARAN STRATEGIS (OUTCOME, OUTPUT YANG DIHARAPKAN)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
		Terkendalinya bahaya banjir, meningkat dan terjaganya ketersediaan air di Daerah Aliran Sungai Bengawan Solo	Jumlah waduk yang dibangun di DAS Bengawan Solo (7 waduk)	1 Waduk Bendo (Ponorogo)	1 Waduk Bendo ^{K)} (Ponorogo)	Pengelolaan Sumber Daya Air	Kementerian Pekerjaan Umum	900,00
				1 Wadung Gondang (Sragen)	1 Wadung Gondang ^{K)} (sragen)			306,00
				Penyelesaian 1 Waduk Gonggang	1 Waduk Gonggang ^{K)}			20,00
				1 Waduk Kresek (Madiun)	1 Waduk Kresek ^{K)} (Madiun)			457,00
				1 Waduk Kedung Bendo (Pacitan)	1 Waduk Kedung ^{K)} Bendo (Pacitan)			553,00
					1 Waduk Kendang ^{K)} (Blora)			107,00
					1 Waduk Pidekso (Wonogiri)			1 Waduk Pidekso ^{K)} (Wonogiri)
		Prasarana sumber daya air di DAS Bengawan Solo yang direhabilitasi	Penanganan Sedimen Waduk Wonogiri dan Konservasi DAS Keduang	Tertanganinya ^{K)} Sedimen Waduk Wonogiri dan Konservasi DAS Keduang	1.060,00			

KEBIJAKAN LINTAS BIDANG: Perubahan Iklim Global

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN SASARAN STRATEGIS (OUTCOME, OUTPUT YANG DIHARAPKAN)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
				Rehabilitasi 7 Waduk (Prijetan, Cengklik, Tlogo Ngebel, Banjar Anyar, Tlego Sarangan, Kedung Uling, Gonggang)	Rehabilitasi 7 Waduk ^{k)} (Prijetan, Cengklik, Tlogo Ngebel, Banjar Anyar, Tlego Sarangan, Kedung Uling, Gonggang)			25,00
				Rehabilitasi Embung / Waduk Lapangan	Terehabilitasi ^{k)} Embung / Waduk Lapangan			105,00
			terpeliharanya waduk di DAS Bengawan Solo	Operasi WS dan Pemeliharaan Infrastruktur SDA Bengawan Solo	Terlaksananya ^{k)} operasi WS dan Pemeliharaan Infrastruktur SDA Bengawan Solo			180,00
			terlaksananya konservasi di DAS Bengawan Solo		Terkonservasinya 2 ^{k)} Kali (Kali Tirtomoyo & Kali Asin)			130,00
					Terkonservasinya ^{k)} arboretum Sumber Daya Air Bengawan Solo			60,00

KEBIJAKAN LINTAS BIDANG: Perubahan Iklim Global

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN SASARAN STRATEGIS (OUTCOME, OUTPUT YANG DIHARAPKAN)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
3	Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi, Rawa dan Air Tanah	Meningkatnya dan terjaganya kualitas dan cakupan layanan pada 2,55 juta hektar daerah irigasi, 1,21 juta daerah rawa dan pemanfaatan air tanah untuk irigasi seluas 44,89 ribu hektar	Luas layanan jaringan irigasi yang ditingkatkan (144,58 ribu hektar)	115 ribu hektar	129,38 ribu hektar ^{K)}	Pengelolaan Sumber Daya Air oleh Ditjen Sumber Daya Air	Kemen. Pekerjaan Umum	2.924,00
			Luas layanan jaringan irigasi yang direhabilitasi (1,34 juta hektar)	200 ribu hektar	1,34 juta hektar ^{K)}			13.000,00
			Luas layanan jaringan irigasi yang dioperasikan dan dipelihara (2,315 juta hektar)	2,315 juta hektar	2,315 juta hektar ^{K)}			2.000,00
			Luas layanan jaringan rawa yang ditingkatkan (10 ribu hektar)	10 ribu hektar	10 ribu hektar ^{K)}			60,00
			Luas layanan jaringan rawa yang direhabilitasi (450 ribu hektar)	85 ribu hektar	450 ribu hektar ^{K)}			1.700,00
			Luas layanan jaringan rawa yang dioperasikan dan dipelihara (1,2 juta hektar)	800 ribu hektar	1,2 juta hektar ^{K)}			1.000,00
			Jumlah sumur air tanah yang dibangun (70 sumur air tanah)	70 sumur air tanah	70 sumur air tanah ^{K)}			77,00
			Jumlah sumur air tanaha yang direhabilitasi (1.875 sumur air tanah) untuk mengairi areal seluas 37.500 hektar	230 sumur air tanah	1.875 sumur air ^{K)} tanah			615,80

KEBIJAKAN LINTAS BIDANG: Perubahan Iklim Global

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN SASARAN STRATEGIS (OUTCOME, OUTPUT YANG DIHARAPKAN)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
			Jumlah sumur air tanah yang dioperasikan dan dipelihara (2.192 sumur air tanah) untuk mengairi areal seluas 43.840 hektar	425 sumur air tanah	2.192 sumur air ^{*)} tanah			219,20
			Luas layanan jaringan tata air tambak yang dibangun / ditingkatkan (seluas 1.000 hektar)	1.000 hektar	1.000 hektar ^{*)}			7,50
			Luas layanan jaringan tata air tambak yang direhabilitasi (seluas 175 ribu hektar)	4.000 hektar	175.000 hektar ^{*)}			525,00
			berkembangnya daerah irigasi dan drainase di DAS Bengawan Solo	Pengembangan DI & Drainase Bengawan Jero / rawa Jero	Berkembangnya DI ^{*)} & Drainase Bengawan Jero / rawa Jero			380,00

KEBIJAKAN LINTAS BIDANG: Perubahan Iklim Global

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN SASARAN STRATEGIS (OUTCOME, OUTPUT YANG DIHARAPKAN)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
4	Pengendalian Banjir, Lahar Gunung Berapi dan Pengamanan Pantai	Terlindunginya kawasan seluas 48,66 ribu hektar dari bahaya banjir dan terlindunginya kawasan pantai sepanjang 80 km dari abrasi pantai serta terkendalinya 16 juta m ³ lahar gunung berapi/sedimen	Panjang sarana/prasarana pengendali banjir yang dibangun (216 km)	168 km	216 km ^{K)}	Pengelolaan Sumber Daya Air oleh Ditjen Sumber Daya Air	Kemen. Pekerjaan Umum	2.508,65
			Panjang sarana/prasarana pengendali banjir yang direhabilitasi (386 km)	139 km	386 km ^{K)}			3.745,00
			Panjang sarana/prasarana pengendali banjir yang dioperasikan dan dipelihara (2.000 km) untuk mengamankan kawasan seluas 35,7 ribu hektar	700 km	2.000 km ^{K)}			927,50
			Jumlah sarana/prasarana pengendali lahar/sedimen yang dibangun (28 buah) untuk mengendalikan lahar/sedimen dengan volume 16 juta m ³	28 buah	28 buah ^{K)}			116,50

KEBIJAKAN LINTAS BIDANG: Perubahan Iklim Global

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN SASARAN STRATEGIS (OUTCOME, OUTPUT YANG DIHARAPKAN)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
			Jumlah sarana/prasarana pengendali lahar/sedimen yang direhabilitasi (85 unit) untuk mengendalikan lahar/sedimen dengan volume 6 juta m ³	4 buah	85 buah ^{K)}			145,00
			Jumlah sarana/prasarana pengendali lahar/sedimen yang dioperasikan dan dipelihara (150 unit) untuk mengendalikan lahar/sedimen dengan volume 12 juta m ³	10 buah	150 buah ^{K)}			75,00
			Panjang sarana/prasarana pengaman pantai yang dibangun (30 km)	30 km	30 km ^{K)}			200,00
			Panjang sarana/prasarana pengaman pantai yang direhabilitasi (50 km)	3 km	50 km ^{K)}			278,45

KEBIJAKAN LINTAS BIDANG: Perubahan Iklim Global

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN SASARAN STRATEGIS (OUTCOME, OUTPUT YANG DIHARAPKAN)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
			Panjang sarana/prasarana pengaman pantai yang dipelihara (50 km)	30 km	50 km ^{k)}			50,00
		Terkendalnya bahaya banjir di Daerah Aliran Sungai Bengawan Solo	terbangunnya prasarana pengendali banjir	pompa banjir di 5 lokasi	pompa banjir di 5 ^{k)} lokasi	Pengelolaan Sumber Daya Air	Kementerian Pekerjaan Umum	40,00
				kawasan retensi di 3 Sungai di Ponorogo	kawasan retensi di 3 ^{k)} Sungai di Ponorogo			50,00
				1 Bendung Gerak/Bojonegoro Barrage	1 Bendung ^{k)} Gerak/Bojonegoro Barrage			260,00
				Jabung Ring Dike	Jabung Ring Dike ^{k)}			460,00

KEBIJAKAN LINTAS BIDANG: Perubahan Iklim Global

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN SASARAN STRATEGIS (OUTCOME, OUTPUT YANG DIHARAPKAN)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
				Remaining Works LSRIIP-phase I	Remaining Works ^{k)} LSRIIP-phase I			100,00
				1 Bendung Gerak Sembayat	1 Bendung Gerak ^{k)} Sembayat			650,00
				Tanggul Kota Ngawi	Tanggul Kota Ngawi ^{k)}			61,00
				Pengaturan kawasan rawan banjir Bojonegoro	Pengaturan kawasan ^{k)} rawan banjir Bojonegoro			40,00
				Flood Forecasting Warning System (FFWS)	Flood Forecasting ^{k)} Warning System (FFWS) Bengawan Solo			40,00
					Tanggul Kiri ^{k)} Bengawan Solo Rengel-Centini			480,00

KEBIJAKAN LINTAS BIDANG: Perubahan Iklim Global

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN SASARAN STRATEGIS (OUTCOME, OUTPUT YANG DIHARAPKAN)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
			terehabilitasinya prasarana pengendali banjir	pintu air Demangan	pintu air Demangan ^{k)}			130,00
				Normalisasi 3 Sungai (Kali Mungkung, Kali Grompol dan Kali Sawur)	Normalisasi Kali 3 ^{k)} sungai (Mungkung, Kali Grompol dan Kali Sawur)			170,00
					Perbaikan dan ^{k)} Pengaturan Kali Madiun (Kwadungan-Ngawi)			540,00
				Normalisasi Kali Lamong	Normalisasi Kali ^{k)} Lamong			1.100,00

KEBIJAKAN LINTAS BIDANG: Perubahan Iklim Global

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN SASARAN STRATEGIS (OUTCOME, OUTPUT YANG DIHARAPKAN)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
				Perbaikan Sungai Bengawan Solo Hulu (Jurug-Sragen)	Perbaikan Sungai ^{k)} Bengawan Solo Hulu (Jurug-Sragen)			2.005,00
				Rehabilitasi Pasca Banjir Kali Madiun	Rehabilitasi Pasca ^{k)} Banjir Kali Madiun			120,00
BIDANG WILAYAH DAN TATA RUANG								
1	Kesiapsiagaan dalam menghadapi Bencana	1. Terlaksananya pendampingan dalam penyusunan rencana kontijensi 2. Terlaksananya kesiapsiagaan dengan pembentukan satuan reaksi cepat penanggulangan bencana (SRC-PB)	1. Jumlah rencana kontijensi yang tersusun; dan 2. Terbentuknya satuan reaksi cepat (SRC-PB)	5	33 ^{k)}	Program Penanggulangan Bencana	BNPB	957,64
2	Tanggap darurat di daerah terkena bencana	Koordinasi dan pelaksanaan penanganan tanggap darurat di pusat dan daerah	Terlaksananya koordinasi dan pelaksanaan penanganan tanggap darurat di pusat dan daerah	55	585 ^{k)}	Program Penanggulangan Bencana	BNPB	137,89

KEBIJAKAN LINTAS BIDANG: Perubahan Iklim Global

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN SASARAN STRATEGIS (OUTCOME, OUTPUT YANG DIHARAPKAN)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
BIDANG SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP								
1	Peningkatan Konservasi dan Pengendalian Kerusakan Ekosistem Pesisir dan Laut	Meningkatnya kualitas kebijakan konservasi dan pengendalian kerusakan ekosistem pesisir dan laut	Jumlah kajian, rekomendasi, dan kebijakan peningkatan konservasi dan pengendalian kerusakan pesisir dan laut yang ditetapkan (per tahun)	3	19 ^{ki}	Program Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	KLH	75,90
			% capaian inventarisasi data kerusakan ekosistem pesisir dan laut dengan basis jumlah kabupaten yang memiliki pesisir [akumulatif]	10%	50%			
			Jumlah daerah yang diverifikasi tingkat kerusakan ekosistem dan kualitas lingkungan (per tahun)	5	41 ^{ki}			
			Jumlah model implementasi kebijakan di regional	5	25 ^{ki}			

KEBIJAKAN LINTAS BIDANG: Perubahan Iklim Global

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN SASARAN STRATEGIS (OUTCOME, OUTPUT YANG DIHARAPKAN)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
2	Pengawasan dan Evaluasi Pemanfaatan Ruang	Terlaksananya pengawasan pemanfaatan ruang dan evaluasi pemanfaatan ruang berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan, yang terpadu dan bersifat lintas K/L	% penyelesaian dokumen konsep, naskah akademis, pedoman dan peraturan perundang-undangan berkaitan dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan [dari 12 dokumen yang direncanakan] yang terkoordinasi antar K/L	16,7%	100%	Program Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	KLH	95,70
			% penyelesaian dokumen pedoman kebijakan pengawasan pemanfaatan ruang berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan [dari 5 dokumen yang direncanakan] yang terkoordinasi antark K/L	20%	100%			

KEBIJAKAN LINTAS BIDANG: Perubahan Iklim Global

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN SASARAN STRATEGIS (OUTCOME, OUTPUT YANG DIHARAPKAN)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
			% penyelesaian kajian daya dukung 4 pulau besar yang terkoordinasi antar K/L	0	100%			
			% penyelesaian kajian penyimpangan pemanfaatan ruang dan dampaknya terhadap lingkungan kerusakan dan bencana [dari 20 lokasi yang direncanakan] dan didiseminasi kepada K/L dan daerah terkait	0	100%			
			% penerapan instrumen daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dalam perencanaan ruang dan evaluasi pemanfaatan ruang di kabupaten dan propinsi [dari 11 kabupaten dan 4 propinsi yang direncanakan] yang terkoordinasi antar K/L dan daerah	6,7%	100%			

KEBIJAKAN LINTAS BIDANG: Perubahan Iklim Global

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN SASARAN STRATEGIS (OUTCOME, OUTPUT YANG DIHARAPKAN)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
			% penerapan instrumen daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup di wilayah ekoregion yang terkoordinasi antar K/L dan daerah	0	100%			
			Jumlah propinsi dilaksanakannya pengawasan dan evaluasi pemanfaatan ruang dan alih fungsi lahan/ruang dan pelaksanaan instrumen pengawasan pemanfaatan ruang di kawasan lahan gambut, hutan dan DAS prioritas untuk menunjang pencapaian Prioritas Nasional 9 RPJMN 2010-2014	2	33			
			% PPLHD yang ditingkatkan kapasitasnya dalam pengawasan pemanfaatan ruang [dari 250 orang PPLHD yang direncanakan]	10%	100%			

KEBIJAKAN LINTAS BIDANG: Perubahan Iklim Global

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN SASARAN STRATEGIS (OUTCOME, OUTPUT YANG DIHARAPKAN)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
3	Penelitian Dan Pengembangan Sumberdaya Lahan Pertanian	Tersedianya data, informasi dan peningkatan inovasi teknologi pengelolaan sumberdaya lahan pertanian	Tersedianya peta potensi sumberdaya lahan pertanian	2,5 juta ha di Sulawesi dan daerah lainnya	15 juta ha ^{k)}	Penciptaan Teknologi dan Varietas Unggul Berdaya Saing	Kementan	295,10
			Jumlah informasi, paket komponen teknologi pengelolaan SDL (tanah, air, perubahan iklim, pupuk dan lingkungan pertanian)	12 paket	11 paket			
4.	Peningkatan produksi ternak ruminansia dengan pendayagunaan sumber daya lokal	Meningkatnya populasi dan produksi ternak ruminansia	Peningkatan produksi dan produktivitas ternak (sapi ekor)	21.000	31.625	Pencapaian Swasembada Daging Sapi dan Peningkatan Penyediaan Pangan Hewani yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal	Kementan	2.418,69

KEBIJAKAN LINTAS BIDANG: Perubahan Iklim Global

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN SASARAN STRATEGIS (OUTCOME, OUTPUT YANG DIHARAPKAN)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
			Swasembada daging sapi (share produk dalam negeri %)	76	90			
			Pemanfaatan kotoran ternak menjadi pupuk organik dan pemberian paket bantuan sosial pupuk organik (rumah kompos) (Dampak Perubahan Iklim)	0	10.000			
			Pengembangan dan pembinaan Biogas Asal Ternak Bersama Masyarakat (BATAMAS) terutama di sentra terpencil dan padat ternak (unit) (Dampak Perubahan Iklim)	100	300			
			Pengembangan integrasi ternak dan tanaman melalui pengelolaan kotoran ternak (padat & cair) menjadi pupuk organik dan pengolahan limbah tanaman untuk ternak terutama di sentra perkebunan, tanaman pangan dan horti kulture (klp) (Dampak Perubahan Iklim)	75	110			

KEBIJAKAN LINTAS BIDANG: Perubahan Iklim Global

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN SASARAN STRATEGIS (OUTCOME, OUTPUT YANG DIHARAPKAN)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
5	Pengembangan pengelolaan lahan pertanian	Meningkatnya produktivitas lahan pertanian, dan prasarana Jalan Usaha Tani/Jalan Produksi serta pengendalian lahan untuk mendukung peningkatan produksi pertanian	Terlaksananya Lahan yang dioptimasi, dikonservasi, direhabilitasi dan direklamasi	25.709	74.648	Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian	Kementan	2.979,69
			Konservasi DAS Hulu 160.000 Ha (Adaptasi Iklim)	9.600	160.000 ^{K)}			
			Terbangunnya Rumha Kompos 6.500 unit	235	6.500 ^{K)}			
			Terlaksananya Pengembangan Systeme of Rice Intensificaion 2000 paket (adaptasi iklim)	62	2.000 ^{K)}			
			Tersedianya data bidang tanah petani yang disertifikasi 200.000 persil	726	200.000 ^{K)}			
			Tersedianya jalan sepanjang 12.500 km untuk JUT dan jalan produksi, serta tersedianya data bidang tanah petani yang layak disertifikasi	952	12.500 ^{K)}			

KEBIJAKAN LINTAS BIDANG: Perubahan Iklim Global

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN SASARAN STRATEGIS (OUTCOME, OUTPUT YANG DIHARAPKAN)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
6	Pendayagunaan pesisir dan lautan	Terkelolanya 50 Kawasan minapolitan yang tahan terhadap ancaman kerusakan dan mempunyai infrastruktur dasar, serta 3 produk kelautan	• Jumlah luasan kawasan pesisir rusak yang pulih kembali.	60 ha	5.000 ha ^{K)}	Program Pengelolaan Sumber Daya Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	KKP	404,50
			Jumlah ragam dan volume produk kelautan yang dikembangkan pada kawasan pesisir dan lautan.					
			- BMKT	2 kapal	12 kapal ^{K)}			
			- Garam	50 ribu ton	500 ribu ton ^{K)}			
			- Deep sea water	200 ribu liter	7,2 juta liter ^{K)}			
7	Penelitian dan Pengembangan IPTEK Kewilayahan, Dinamika dan Sumberdaya Nonhayati Pesisir dan Laut	Wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil yang teridentifikasi potensi, karakteristik, kebutuhan konservasi SDNHL dan fenomena alamnya serta jumlah rekomendasi pengelolaan dan model pemanfaatannya	Jumlah rekomendasi pengelolaan dan model pemanfaatannya, serta Jumlah paket data terkait dengan fenomena alam dan sumber daya non hayati di wilayah pesisir ,laut, serta pulau-pulau kecil	Rekomendasi dan/atau model pemanfaatan: 3	15 ^{K)}	Program Penelitian dan Pengembangan IPTEK Kelautan dan Perikanan	KKP	260,70
				1 paket data terkait fenomena alam laut, 5 paket data terkait SDNH, pesisir, dan laut	5 paket data terkait ^{K)} fenomena alam laut, 25 paket data terkait SDNH, pesisir, dan laut			

KEBIJAKAN LINTAS BIDANG: Perubahan Iklim Global

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN SASARAN STRATEGIS (OUTCOME, OUTPUT YANG DIHARAPKAN)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
8	Penelitian dan Pengembangan IPTEK Kelautan	Rekomendasi dan inovasi teknologi perlindungan pantai, energy terbarukan, pengawasan, eksplorasi, eksploitasi, instrumentasi kelautan, maritim, mitigasi/adaptasi bencana dan perubahan iklim yang meningkatkan efisiensi pengelolaan sumber daya kelautan	Jumlah rekomendasi dan inovasi teknologi perlindungan, pengawasan, eksplorasi, eksploitasi, instrumentasi kelautan, maritim, mitigasi/adaptasi bencana dan perubahan iklim yang meningkatkan efisiensi pengelolaan sumber daya kelautan secara berkelanjutan	9	45 ^{k)}	Program Penelitian dan Pengembangan IPTEK Kelautan dan Perikanan	KKP	242,80
9	Pengelolaan dan pengembangan konservasi kawasan dan jenis	Terkelolanya 20% kawasan ekosistem terumbu karang, lamun, mangrove dan 15 jenis biota perairan yang terancam punah	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kawasan konservasi laut dan kawasan konservasi perairan tawar dan payau yang dikelola secara berkelanjutan seluas 4,5 juta ha ▪ Jumlah kawasan konservasi dan jenis biota perairan dilindungi yang diidentifikasi dan dipetakan secara akurat 	900 ribu ha 9 Kawasan dan 3 jenis	4,5 juta ha ^{k)} 9 Kawasan dan 3 jenis	Program Pengelolaan Sumber Daya Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	KKP	745,50

KEBIJAKAN LINTAS BIDANG: Perubahan Iklim Global

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN SASARAN STRATEGIS (OUTCOME, OUTPUT YANG DIHARAPKAN)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
10	Penataan ruang dan perencanaan pengelolaan wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil	Tersedianya 145 rencana zonasi nasional/ provinsi/ kabupaten/ kota, 50 masterplan minapolitan, 30 masterplan kluster pulau-pulau kecil bernilai ekonomi tinggi serta 12 master plan kawasan sentra produksi kelautan	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah kawasan laut dan pesisir yang memiliki peta potensi dan arahan pemanfaatan yang terintegrasi, akuntabel dan terkini Jumlah kawasan pulau-pulau kecil yang memiliki peta potensi dan arahan pemanfaatan yang terintegrasi, akuntabel dan terkini 	6 kawasan	50 kawasan ^{K)}	Program Pengelolaan Sumber Daya Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	KKP	481,10
				23 kawasan	145 kawasan ^{K)}			
KEGIATAN MITIGASI								
BIDANG EKONOMI								
1	Koordinasi Dan Sinkronisasi Kebijakan Bidang Percepatan Penyediaan Dan Pemanfaatan Energi Alternatif	Meningkatnya koordinasi dan sinkronisasi implementasi kebijakan bidang energi alternatif	Persentase rekomendasi Koordinasi Dan Sinkronisasi Kebijakan Bidang Percepatan Penyediaan Dan Pemanfaatan Energi Alternatif yang telah terimplementasi	50%	90%	Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian	KEMENKO PEREKONOMIAN / Deputi Bidang Koordinasi Energi, Sumber Daya Mineral Dan Kehutanan (Deputi III)	13,00
2	Koordinasi Pengembangan Kebijakan Pengembangan Bahan Bakar Nabati	Meningkatnya koordinasi kebijakan pengembangan bahan bakar nabati	Persentase hasil rekomendasi kebijakan hasil koordinasi yang diimplementasikan pengembangan bahan bakar nabati	40%	75%	Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian	KEMENKO PEREKONOMIAN	3,65

KEBIJAKAN LINTAS BIDANG: Perubahan Iklim Global

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN SASARAN STRATEGIS (OUTCOME, OUTPUT YANG DIHARAPKAN)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
3	Koordinasi Pengembangan Desa Mandiri Energi	Meningkatnya koordinasi pengembangan Desa Mandiri Energi	Persentase rekomendasi kebijakan hasil sinkronisasi yang ditindaklanjuti dalam pelaksanaan kebijakan Desa Mandiri Energi	40%	70%	Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian	KEMENKO PEREKONOMIAN / Deputi Bidang Koordinasi Energi, Sumber Daya Mineral Dan Kehutanan (Deputi III)	3,70
BIDANG SARANA DAN PRASARANA								
1	Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, Pengembangan Sumber Pembiayaan Dan Pola Investasi, serta Pengelolaan Pengembangan Infrastruktur Sanitasi dan Persampahan	75 buah NSPK	Jumlah NSPK untuk pengelolaan air limbah, drainase, dan persampahan yang tersusun	3 NSPK air limbah; 2 NSPK drainase; 3 NSPK persampahan	25 NSPK air limbah; ^{KJ} 20 NSPK drainase; 30 NSPK persampahan	Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Ditjen Cipta Karya, Kemen. PU	67,70
		426 Bantek, Bintek, dan pendampingan SSK	Jumlah Bantek, Bintek, dan pendampingan (SSK) pengelolaan air limbah, drainase, dan persampahan	34 Bantek, Bintek, dan pendampingan (SSK) air limbah; 8 Bantek, Bintek, dan pendampingan (SSK) drainase; 22 Bantek, Bintek, dan pendampingan (SSK) persampahan	266 Bantek, Bintek, ^{KJ} dan pendampingan (SSK) air limbah; 50 Bantek, Bintek, dan pendampingan (SSK) drainase; 150 Bantek, Bintek, dan pendampingan (SSK) persampahan			644,68

KEBIJAKAN LINTAS BIDANG: Perubahan Iklim Global

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN SASARAN STRATEGIS (OUTCOME, OUTPUT YANG DIHARAPKAN)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
		65 paket diklat	Jumlah penyelenggaraan pelatihan (Diklat) teknis pengelolaan sanitasi lingkungan dan persampahan	6 paket diklat pengelolaan air limbah; 2 paket diklat pengelolaan drainase; 2 paket diklat pengelolaan persampahan	35 paket diklat ^{k)} pengelolaan air limbah; 15 paket diklat pengelolaan drainase; 15 paket diklat pengelolaan persampahan			129,52
		426 kegiatan monev	Jumlah monev kinerja pengembangan air limbah, drainase, dan persampahan	34 kegiatan monev air limbah; 7 kegiatan monev drainase; 21 kegiatan monev persampahan	226 kegiatan monev ^{k)} air limbah; 50 kegiatan monev drainase; 50 kegiatan monev persampahan			54,90
		15 kegiatan fasilitasi pengembangan sumber pembiayaan dan pengembangan pola investasi persampahan	Jumlah fasilitasi pengembangan sumber pembiayaan dan pola investasi bidang persampahan melalui kerjasama pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat	2 kegiatan fasilitasi	15 kegiatan fasilitasi ^{k)}			15,00

KEBIJAKAN LINTAS BIDANG: Perubahan Iklim Global

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN SASARAN STRATEGIS (OUTCOME, OUTPUT YANG DIHARAPKAN)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
		peningkatan pelayanan air limbah di 221 kab/kota	Pembangunan prasarana dan sarana air limbah dengan sistem off-site dan on-site	11 kab/kota sistem off-site; 30 kab/kota sistem on-site	55 kab/kota sistem ^{k)} off-site; 210 kab/kota sistem on-site			4.458,00
		penanganan drainase di 50 kab/kota (4.600 Ha)	Pembangunan drainase perkotaan	26 kab/kota	45 kab/kota			3.204,00
		peningkatan TPA di 210 kab/kota , sarana pengumpul sampah sebanyak 250 unit , persampahan terpadu 3R di 250 lokasi	Peningkatan/pembangunan TPA, prasarana pengumpulan sampah dan persampahan terpadu 3R	55 kab/kota peningkatan TPA dan 50 lokasi persampahan terpadu 3R	315 kab/kota ^{k)} peningkatan TPA, 300 unit pengumpul sampah dan 200 lokasi persampahan terpadu 3R			5.500,00

KEBIJAKAN LINTAS BIDANG: Perubahan Iklim Global

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN SASARAN STRATEGIS (OUTCOME, OUTPUT YANG DIHARAPKAN)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
2	Pembinaan dan pengembangan Sistem Transportasi Perkotaan	Tersusunnya 100% rencana dan program sistem transportasi dan evaluasi pelaksanaan program	Jumlah Rencana Induk angkutan perkotaan, rencana induk sistem informasi lalu lintas perkotaan, Laporan evaluasi, Terselenggaranya ATCS, Jumlah Fasilitas Keselamatan Transportasi Perkotaan	1 Paket	583 Paket ^{k)}	Program Pengelolaan dan Pelayanan Transportasi Darat	Kemen. Perhubungan	282,46
		Terselenggaranya Transportasi Perkotaan	Jumlah Pengembangan Bus Rapid Transit (BRT), Kota Percontohan, Kawasan Percontohan	1 Paket	5 Paket ^{k)}			379,22
		Transportasi Ramah lingkungan	Jumlah Penyelenggaraan Transportasi Ramah Lingkungan	1 Paket	5 Paket ^{k)}			87,55
BIDANG WILAYAH DAN TATA RUANG								
1	Fasilitasi Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna	Pelayanan pengelolaan sumber daya alam dan pendayagunaan teknologi tepat guna sesuai standar	1. Jumlah fasilitasi pelaksanaan pengelolaan konservasi dan rehabilitasi lingkungan perdesaan melalui pelatihan, rakor, supervisi, BLM dan evaluasi dengan kegiatan : - Pemanfaatan lahan kritis sebagai pilot project DME	14 desa di 13 provinsi	20 desa di 20 provinsi	Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	Kementerian Dalam Negeri	40,45

KEBIJAKAN LINTAS BIDANG: Perubahan Iklim Global

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN SASARAN STRATEGIS (OUTCOME, OUTPUT YANG DIHARAPKAN)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
			- Pengelolaan Desa Hutan	4 desa, 4 provinsi	22 desa, 21 provinsi ^{k)}			
			- Pengelolaan Hutan Mangrove	1 desa, 1 provinsi	7 desa, 7 provinsi ^{k)}			
			2. Jumlah fasilitasi pemberdayaan masyarakat dalam pemanfaatan lahan dan pesisir perdesaan melalui identifikasi, pelatihan, bintek, rakor, BLM, dan monev (termasuk PNPM-LMP yang fokus kegiatannya pada penanganan lingkungan perdesaan dan mikrohydro)	33 Provinsi, 23 Kab dan 72 Kec	33 Provinsi	Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	Kementerian Dalam Negeri	131,18
2	Pengembangan Sarana dan Prasarana Kawasan Transmigrasi	Meningkatnya fungsi dan ketersediaan sarana prasarana di kawasan transmigrasi (Pembangunan Perdesaan di Daerah Tertinggal)	Pengembangan Jalan	120 Km	483,559 Km ^{k)}	Program Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi	Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi	899,45
			Pengembangan Drainase	14,4 Km	47,84 Km ^{k)}			
			Pengembangan Sarana Air Bersih	3.150.000 liter	11.155.452 liter ^{k)}			
			Pengembangan Energi Terbarukan	-	71.200 Watt ^{k)}			
			Pengembangan Bangunan Fasilitas Umum	32 Unit	190 Unit ^{k)}			
			Rehabilitasi Rumah Transmigran	700 Unit	1.680 Unit ^{k)}			

KEBIJAKAN LINTAS BIDANG: Perubahan Iklim Global

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN SASARAN STRATEGIS (OUTCOME, OUTPUT YANG DIHARAPKAN)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
3	Penyerasian Lingkungan di Kawasan Transmigrasi	Meningkatnya pengelolaan dan pemanfaatan lingkungan dalam mendukung kelestarian fungsi lingkungan hidup di kawasan transmigrasi (Pembangunan Perdesaan di Daerah Tertinggal)	Jumlah dokumen pengelolaan lingkungan hidup di kawasan transmigrasi	24 Dok	112 Dok ^{K)}	Program Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi	Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi	465,75
			Jumlah mitigasi lingkungan	13	94 ^{K)}			
			Jumlah fasilitasi dan advokasi penyerasian lingkungan	5 Pkt	25 Pkt ^{K)}			
		Meningkatnya kemandirian masyarakat di permukiman transmigrasi pada kawasan tertinggal (Pembangunan Perdesaan di Daerah Tertinggal)	Jumlah permukiman transmigrasi yang mandiri	12 kimtrans	132 kimtrans ^{K)}			

KEBIJAKAN LINTAS BIDANG: Perubahan Iklim Global

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN SASARAN STRATEGIS (OUTCOME, OUTPUT YANG DIHARAPKAN)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
		Meningkatnya Desa Mandiri Energi dikawasan Transmigrasi (Pembangunan Perdesaan di Daerah Tertinggal)	Jumlah permukiman transmigrasi yang akan berkembang menjadi Desa Mandiri Energi	1 kimtrans	5 kimtrans ^{K)}			
		Meningkatnya kelestarian dan fungsi lingkungan hidup di kawasan transmigrasi (Pembangunan Perdesaan di Daerah Tertinggal)	Jumlah dokumen pengelolaan lingkungan	1 Dok	8 Dok ^{K)}			
			Jumlah Evaluasi Perkembangan Kawasan	-	44 Kws ^{K)}			
			Jumlah mitigasi lingkungan	7 Kws	22 Kws ^{K)}			
		Meningkatnya pengelolaan dan pemanfaatan lingkungan dalam mendukung kelestarian fungsi lingkungan hidup di kawasan transmigrasi (Pembangunan Perdesaan di Daerah Perbatasan)	Jumlah dokumen pengelolaan lingkungan hidup di kawasan transmigrasi	4 Dok	26 Kws ^{K)}			
			Jumlah mitigasi lingkungan	2 kimtrans	16 kimtrans ^{K)}			
			Jumlah fasilitasi dan advokasi penyerasian lingkungan	1 Pkt	5 Pkt ^{K)}			
		Meningkatnya kemandirian masyarakat di permukiman transmigrasi pada kawasan tertinggal (Pembangunan Perdesaan di Daerah Perbatasan)	Jumlah permukiman transmigrasi yang mandiri	2 kimtrans	21 kimtrans ^{K)}			

KEBIJAKAN LINTAS BIDANG: Perubahan Iklim Global

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN SASARAN STRATEGIS (OUTCOME, OUTPUT YANG DIHARAPKAN)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
		Meningkatnya Desa Mandiri Energi dikawasan Transmigrasi (Pembangunan Perdesaan di Daerah Perbatasan)	Jumlah permukiman transmigrasi yang akan berkembang menjadi Desa Mandiri Energi	1 kimtrans	5 kimtrans ^{K)}			
		Meningkatnya kelestarian dan fungsi lingkungan hidup di kawasan transmigrasi (Pembangunan Perdesaan di Daerah Perbatasan)	Jumlah dokumen pengelolaan lingkungan	1 Dok	5 Dok ^{K)}			
			Jumlah Evaluasi Perkembangan Kawasan Transmigrasi	-	12 Kws ^{K)}			
			Jumlah mitigasi lingkungan	2 Kws	9 Kws ^{K)}			
		Meningkatnya pengelolaan dan pemanfaatan lingkungan dalam mendukung kelestarian fungsi lingkungan hidup di kawasan transmigrasi (Pembangunan Perdesaan di Wilayah Strategis)	Jumlah dokumen pengelolaan lingkungan hidup di kawasan transmigrasi	6 Dok	28 Dok ^{K)}			
			Jumlah mitigasi lingkungan	3 kimtrans	25 kimtrans ^{K)}			

KEBIJAKAN LINTAS BIDANG: Perubahan Iklim Global

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN SASARAN STRATEGIS (OUTCOME, OUTPUT YANG DIHARAPKAN)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
		Meningkatnya kemandirian masyarakat di permukiman transmigrasi pada kawasan tertinggal (Pembangunan Perdesaan di Wilayah Strategis)	Jumlah permukiman transmigrasi yang mandiri	4 kimtrans	38 Kimtrans ^{K)}			
		Meningkatnya kelestarian dan fungsi lingkungan hidup di kawasan transmigrasi (Pembangunan Perdesaan di Wilayah Strategis)	Jumlah dokumen pengelolaan lingkungan	1 Dok	12 Dok ^{K)}			
			Jumlah Evaluasi Perkembangan Kawasan Transmigrasi	-	12 Kws ^{K)}			
			Jumlah mitigasi lingkungan	1 Kws	9 Kws ^{K)}			
BIDANG SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP								
1	Pengendalian Pencemaran Udara	Menurunnya beban pencemar udara dari industri yang dipantau dan diawasi	Jumlah industri pertambangan, energi dan migas yang dipantau dan diawasi	200	220	Program Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	KLH	120,84

KEBIJAKAN LINTAS BIDANG: Perubahan Iklim Global

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN SASARAN STRATEGIS (OUTCOME, OUTPUT YANG DIHARAPKAN)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
			Jumlah agroindustri yang dipantau dan diawasi	220	245			
			Jumlah industri manufaktur yang dipantau dan diawasi	260	330			
			Jumlah industri yang taat terhadap peraturan LH	480	720			
			Jumlah penurunan beban pencemar udara dari industri yang dipantau dan diawasi	2,5%	12,5% ^{K)}			
			Jumlah pedoman teknis/peraturan perundang-undangan	2	26 ^{K)}			
2	Pengendalian Pencemaran Udara Dari Emisi dan Kebisingan Kendaraan Bermotor	Menurunnya emisi dan kebisingan dari kendaraan di prioritas kota-kota yang dipantau	Jumlah peraturan perundangan yang ditetapkan	2	37 ^{K)}	Program Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	KLH	104,80

KEBIJAKAN LINTAS BIDANG: Perubahan Iklim Global

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN SASARAN STRATEGIS (OUTCOME, OUTPUT YANG DIHARAPKAN)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
			Jumlah daerah (provinsi/kota) yang difasilitasi dalam penyusunan Peraturan Daerah tentang pengendalian pencemaran udara khususnya sumber bergerak	4	36 ^{ki}			
			Jumlah kota yang difasilitasi dalam penerapan pemeriksaan emisi dan perawatan kendaraan bermotor (P&P)	4	36 ^{ki}			

KEBIJAKAN LINTAS BIDANG: Perubahan Iklim Global

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN SASARAN STRATEGIS (OUTCOME, OUTPUT YANG DIHARAPKAN)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
			Jumlah kebijakan sektor yang difasilitasi dalam mendukung reduksi emisi (penetapan standar emisi dan kebisingan, bahan bakar, manajemen transportasi, kendaraan tidak bermotor (NMT), uji emisi bagi kendaraan pribadi, <i>land use planning</i>)	2	10 ^{K)}			
			Jumlah kota yang dievaluasi kualitas udaranya	16	36			
			Jumlah pembinaan teknis dalam pengendalian pencemaran sumber bergerak	5	25 ^{K)}			

KEBIJAKAN LINTAS BIDANG: Perubahan Iklim Global

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN SASARAN STRATEGIS (OUTCOME, OUTPUT YANG DIHARAPKAN)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
3	Perlindungan Atmosfir dan Pengendalian Dampak Perubahan Iklim	Tersedianya perangkat kebijakan dan terlaksananya kegiatan untuk melindungi fungsi atmosfer & mengendalikan dampak perubahan iklim	Jumlah konsep kebijakan di bidang perlindungan atmosfer dan pengendalian dampak perubahan iklim	3	17 ^{ki}	Program Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	KLH	96,60
			% penyiapan penyusunan perangkat untuk sektor yang akan mendapatkan bimbingan teknis untuk melakukan inventori GRK & BPO	100%	100%			
			Jumlah sektor yang mendapatkan bimbingan teknis untuk melakukan inventori GRK & BPO	-	6			
			% penetapan baseline untuk pengurangan konsumsi Bahan Perusak Ozon (BPO) - HCFC	100%	100%			
			% pengurangan konsumsi Bahan Perusak Ozon (BPO) - HCFC	-	10%			
			Jumlah pemerintah daerah provinsi yang dilakukan pembinaan teknis untuk kajian kerentanan dan adaptasi perubahan iklim	3	11			

KEBIJAKAN LINTAS BIDANG: Perubahan Iklim Global

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN SASARAN STRATEGIS (OUTCOME, OUTPUT YANG DIHARAPKAN)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
			Jumlah sektor dan daerah yang mendapatkan bimbingan teknis untuk melakukan kegiatan perlindungan atmosfer dan pengendalian dampak perubahan iklim	5	50 ^{ko}			
			Implementasi konsep Program Kampung Iklim	2	22 ^{ko}			
4	Peningkatan Konservasi dan Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan	Meningkatnya kualitas kebijakan konservasi dan pengendalian kerusakan hutan dan lahan yang terpadu dan bersifat lintas K/L, antara lain dengan Kemenhut, BPN dan Pemda	Jumlah kebijakan konservasi dan pengendalian kerusakan hutan dan lahan yang ditetapkan/ diterbitkan (kriteria dan pedoman) yang terkoordinasi antar K/L dan daerah terkait	3	15 ^{ko}	Program Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	KLH	143,29
			Data sebaran hotspot di 8 Provinsi rawan kebakaran hutan dan lahan yang didiseminasi ke K/L dan daerah terkait	80%	80%			
			Diterapkannya mekanisme pencegahan kebakaran hutan dan lahan di 8 provinsi rawan kebakaran hutan dan lahan yang terkoordinasi antar K/L dan daerah	8	8			

KEBIJAKAN LINTAS BIDANG: Perubahan Iklim Global

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN SASARAN STRATEGIS (OUTCOME, OUTPUT YANG DIHARAPKAN)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
			Data kondisi kerusakan hutan dan lahan pada 11 DAS prioritas dan berpotensi rawan longsor yang terkoordinasi antar K/L terkait	80%	80%			
			Data tutupan lahan dan perubahan penggunaan lahan (land use change) melalui Program Menuju Indonesia Hijau	100%	100%			
			Jumlah provinsi (pendekatan ekosistem) yang dipantau sesuai data potensi dan kejadian bencana	10	30			
			% rekomendasi kebijakan konservasi an pengendalian kerusakan hutan dan lahan yang diimplementasikan daerah dari jumlah propinsi yang dipantau setiap tahunnya	50%	50%			

KEBIJAKAN LINTAS BIDANG: Perubahan Iklim Global

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN SASARAN STRATEGIS (OUTCOME, OUTPUT YANG DIHARAPKAN)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
5	Pengembangan Kawasan Konservasi dan Ekosistem Esensial	Meningkatnya pengelolaan dan pendayagunaan 50 unit taman nasional dan 477 unit kawasan konservasi lainnya (CA, SM, TB, dan HL) dan ekosistem esensial.	Konflik dan tekanan kawasan terhadap kawasan taman nasional dan kawasan konservasi lainnya (CA, SM, TB, dan HL) menurun sebanyak 5%	1%	5%	Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Perlindungan Hutan	Kemenhut	1.381,30
			Pengelolaan ekosistem esensial, termasuk peningkatan keberdayaan pengelolaan lahan gambut, sebagai kawasan penyangga kehidupan meningkat 10%.	2%	10%			
			Penanganan perambahan kawasan hutan pada 12 provinsi prioritas (Sumut, Riau, Jambi, Kaltim, Kalteng, Kalsel, Kalbar, Sultra, dan Sulteng)	2 Prov	12 Prov			
			Restorasi ekosistem kawasan konservasi, 1 paket per tahun	1 paket	5 paket			

KEBIJAKAN LINTAS BIDANG: Perubahan Iklim Global

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN SASARAN STRATEGIS (OUTCOME, OUTPUT YANG DIHARAPKAN)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
6	Penyidikan dan Perlindungan Hutan	Meningkatnya pengamanan kawasan hutan, hasil hutan dan hak negara atas hutan	Kasus baru tindak pidana kehutanan (illegal logging, perambahan, perdagangan TSL, illegal, penambangan illegal dan kebakaran) penanganannya terselesaikan minimal sebanyak 75%	15%	75%	Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Perlindungan Hutan	Kemenhut	836,70
			Tunggakan perkara (illegal logging, perambahan, perdagangan TSL illegal, penambangan illegal dan kebakaran) terselesaikan sebanyak 25% per tahun	25%	76,3%			
			Kasus hukum perambahan kawasan konservasi terselesaikannya sebanyak 20%	4%	20%			

KEBIJAKAN LINTAS BIDANG: Perubahan Iklim Global

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN SASARAN STRATEGIS (OUTCOME, OUTPUT YANG DIHARAPKAN)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
7	Pengendalian kebakaran hutan	Meningkatkan sistem pencegahan pemadaman, penanggulangan, dampak kebakaran hutan dan lahan	Hotspot di Pulau Kalimantan, Pulau Sumatera, dan Pulau Sulawesi berkurang 20% setiap tahun.	20%	67,2%	Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Perlindungan Hutan	Kemenhut	1.275,00
			Luas kawasan hutan yang terbakar ditekan hingga 50% dibandingkan kondisi tahun 2008	10%	50%			
			Peningkatan kapasitas aparat pemerintah dan masyarakat dalam penanggulangan bahaya kebakaran hutan di 30 DAOPS	6 DAOPS	30 DAOPS			

KEBIJAKAN LINTAS BIDANG: Perubahan Iklim Global

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN SASARAN STRATEGIS (OUTCOME, OUTPUT YANG DIHARAPKAN)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
8	Pengembangan Perhutanan Sosial	Meningkatnya pengelolaan hutan melalui pemberdayaan masyarakat	Fasilitasi penetapan areal kerja pengelolaan hutan kemasyarakatan (HKm) seluas 2 juta ha	800.000 Ha	2.000.000 Ha	Peningkatan Fungsi dan Daya Dukung DAS Berbasis Pemberdayaan Masyarakat	Kemenhut	6.239,20
			Fasilitasi 500 kelompok/unit ijin usaha pengelolaan HKm	100 Klpk	500 Klpk			
			Fasilitasi 50 unit kemitraan usaha HKm	10 Unit	50 Unit			
			Fasilitasi dukungan kelembagaan ketahanan pangan di 32 provinsi	4 Prov	32 Prov			
			Fasilitasi pembangunan hutan rakyat Kemitraan untuk bahan baku kayu industri pertukangan seluas 250.000 Ha	50.000 Ha	250.000 Ha			

KEBIJAKAN LINTAS BIDANG: Perubahan Iklim Global

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN SASARAN STRATEGIS (OUTCOME, OUTPUT YANG DIHARAPKAN)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
			Fasilitasi pembentukan dan berfungsinya sentra HHBK Unggulan di 30 kabupaten	6 Kab	30 Kab			
			Areal kerja hutan desa seluas 500.000 ha	100.000 ha	500.000 ha			
9	Penyelenggaraan Rehabilitasi Hutan dan Lahan, dan Reklamasi Hutan di DAS Prioritas	Berkurangnya lahan kritis melalui rehabilitasi dan reklamasi hutan	Fasilitasi dan pelaksanaan rehabilitasi hutan pada DAS prioritas seluas 800.000 ha	160.000 ha	800.000 ha	Peningkatan Fungsi dan Daya Dukung DAS Berbasis Pemberdayaan Masyarakat	Kemenhut	8.222,50
			Fasilitasi rehabilitasi lahan kritis pada DAS prioritas seluas 500.000 ha	100.000 ha	500.000 ha			
			Fasilitasi pengembangan hutan kota seluas 5.000 ha	1.000 ha	5.000 ha			
			Fasilitas rehabilitasi hutan mangrove, gambut dan rawa seluas 295.000 ha	60.000 ha	295.000 ha			

KEBIJAKAN LINTAS BIDANG: Perubahan Iklim Global

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN SASARAN STRATEGIS (OUTCOME, OUTPUT YANG DIHARAPKAN)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
10	Peningkatan Pengelolaan Hutan Alam Produksi	Peningkatan produksi dan diversifikasi hutan alam	Produksi hasil hutan kayu/bukan kayu/jasa lingkungan sebesar 5 %	1%	5%	Peningkatan Pemanfaatan Hutan Produksi	Kemenhut	275,70
			Unit IUPHHK bersertifikat PHPL meningkat 50 %	10%	50%			
			50% produksi penebangan bersertifikat Legalitas Kayu	10%	50%			
			Pengelolaan LOA oleh IUPHHK-HA/RE seluas 2,5 juta ha	300.000 ha	2.500.000 ha			
11	Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)	Terwujudnya pengelolaan kawasan hutan dalam unit-unit pengelolaan, baik kawasan hutan konservasi, hutan produksi maupun hutan lindung	Penetapan wilayah kesatuan pengelolaan hutan produksi (KPHP) di 28 provinsi	4 Prov	28 Prov	Perencanaan Makro Bidang Kehutanan dan Pemantapan Kawasan Hutan	Kemenhut	189,00
			Penetapan wilayah kesatuan pengelolaan hutan konservasi (KPHK) di seluruh Indonesia	4 Prov	28 Prov			
			Penetapan wilayah kesatuan pengelolaan hutan lindung (KPHL) di 28 provinsi	4 Prov	28 Prov			

KEBIJAKAN LINTAS BIDANG: Perubahan Iklim Global

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN SASARAN STRATEGIS (OUTCOME, OUTPUT YANG DIHARAPKAN)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
			Peraturan perundang-undangan penyelenggaraan kesatuan pengelolaan hutan (KPH) sebanyak 4 judul	2 Judul	4 Judul			
			Peta areal kerja dan peta pencadangan (IUPHHK-HT dan HA, HKm, HTR) selesai 90%.	15%	90%			
12	Penyusunan rencana makro kawasan hutan	Perencanaan kawasan hutan secara optimal yang meliputi rencana makro kawasan hutan, penataan ruang, statistik dan pengemhangan jaringan komunikasi data kehutanan	Rencana makro kehutanan tentang perlindungan dan konservasi SDA, pemanfaatan, rehabilitasi hutan dan lahan, dan penataan ruang sebanyak 4 judul	1 judul	4 judul	Perencanaan Makro Bidang Kehutanan dan Pemantapan Kawasan Hutan	Kemenhut	298,50
			Persetujuan substansi teknis kehutanan dalam revisi RTRWP di seluruh Indonesia	50%	100%			
			Bahan kebijakan perencanaan ruang, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang kawasan hutan sebanyak 3 judul dan data strategis kehutanan sebanyak 5 judul	2 judul	8 judul			

KEBIJAKAN LINTAS BIDANG: Perubahan Iklim Global

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN SASARAN STRATEGIS (OUTCOME, OUTPUT YANG DIHARAPKAN)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
13	Pengendalian penggunaan kawasan hutan untuk pembangunan di luar kegiatan kehutanan	Terlaksananya penggunaan kawasan hutan sesuai dengan persyaratan teknis dan ketentuan yang berlaku	Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan dengan kompensasi penerimaan bukan pajak (PNBP) paling tinggi 80% dari pemohon	16%	80%	Perencanaan Makro Bidang Kehutanan dan Pemantapan Kawasan Hutan	Kemenhut	53,50
			Wajib bayar tertib membayar PNBP Penggunaan Kawasan Hutan minimal 80%	15%	80%			
			Data dan informasi penggunaan kawasan hutan tersedia di 32 provinsi	6 Prov	32 Prov			
			Peraturan perundangan untuk pengendalian dan penertiban penggunaan kawasan hutan tanpa ijin sebanyak 1 judul	1 Judul	1 Judul			
14	Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Kehutanan dan Perubahan Iklim.	Ketersediaan dan Termanfaatkannya IPTEK dasar dan terapan bidang lansekap hutan, adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, dan kebijakan kehutanan	Iptek dasar dan terapan yang dihasilkan pada bidang lansekap hutan, perubahan iklim dan kebijakan kehutanan sebanyak 7 judul	20%	100%	Penelitian dan Pengembangan Kementerian Kehutanan	Kemenhut	113,40
			Iptek dasar dan terapan yang dimanfaatkan oleh pengguna pada bidang lansekap hutan, perubahan iklim dan kebijakan kehutanan sebanyak 7 judul.	20%	100%			

KEBIJAKAN LINTAS BIDANG: Perubahan Iklim Global

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN SASARAN STRATEGIS (OUTCOME, OUTPUT YANG DIHARAPKAN)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
15	Pembinaan dan Penyelenggaraan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi	Peningkatan Kapasitas, kehandalan dan efisiensi infrastruktur sistem penyediaan bahan bakar dan bahan baku industri	Jumlah laporan pengembangan kapasitas dalam negeri (infrastruktur cadangan strategis minyak bumi dan BBM)	1 lap	5 lap ^{K)}	Program Pengelolaan dan Penyediaan Minyak dan Gas Bumi	KESDM	7,51
			Jumlah laporan pemutakhiran kapasitas penyimpanan dalam negeri (peta dan data fasilitas pengangkutan dan penyimpanan migas)	2 lap	10 lap ^{K)}			2,76
			Jumlah laporan kapasitas pengangkutan (pemetaan kapasitas infrastruktur dan kebutuhan fasilitas pendistribusian bahan bakar minyak dan gas)	1 lap	5 lap ^{K)}			2,76
			Jumlah laporan produksi (monitoring dan evaluasi kegiatan operasi kilang migas)	1 lap	5 lap ^{K)}			3,60
			Pemenuhan BBM dalam negeri untuk Indonesia bagian timur	73,36%	73,60%			15,43

KEBIJAKAN LINTAS BIDANG: Perubahan Iklim Global

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN SASARAN STRATEGIS (OUTCOME, OUTPUT YANG DIHARAPKAN)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
			Laporan penggunaan BBN dalam pemakaian Bahan Bakar total	6 lap	30 lap			115,53
			Jumlah laporan Desa Mandiri Energi berbasis BBN (pengawasan, pembinaan dan pengembangan DME)	2 lap	10 lap			16,58
			Jumlah laporan penjualan hasil olahan migas	3 lap	15 lap			15,58
			Jumlah laporan kelangkaan pendistribusian LPG 3 kg (PSO) ke seluruh Indonesia	3 lap	9 lap			11,05
			Jumlah laporan penambahan kapasitas Depot	4 lap	20 lap			12,71
			Jumlah laporan Indeks kepuasan konsumen bahan bakar	4 lap	20 lap			35,48
			Jumlah laporan usaha pengolahan minyak bumi	1 lap	5 lap			3,60
			Jumlah laporan usaha pengolahan gas bumi	1 lap	5 lap			3,60
			Jumlah laporan usaha pengolahan Hasil Olahan	1 lap	5 lap			3,60
			Jumlah laporan usaha pengangkutan	1 lap	5 lap			3,60
			Jumlah laporan usaha pengangkutan gas bumi melalui pipa	1 lap	5 lap			6,63

KEBIJAKAN LINTAS BIDANG: Perubahan Iklim Global

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN SASARAN STRATEGIS (OUTCOME, OUTPUT YANG DIHARAPKAN)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
			Jumlah laporan usaha penyimpanan	1 lap	5 lap ^{KJ}			2,21
			Jumlah laporan usaha niaga minyak bumi, Bahan Bakar Minyak, LPG, LNG, CNG serta hasil Olahan	1 lap	5 lap ^{KJ}			3,44
			Jumlah usaha niaga gas bumi melalui pipa	1 lap	5 lap ^{KJ}			3,44
			Jumlah rekomendasi pemantauan realisasi ekspor minyak dan evaluasi stok minyak mentah	2 lap	10 lap ^{KJ}			8,50
			Jumlah pelanggaran regulasi usaha hilir (Sosialisasi dan menyusun peraturan, pameran)	1 pkt	5 pkt ^{KJ}			10,64
			Laporan prosentase penghematan BBM Bersubsidi	2 lap	10 lap ^{KJ}			15,73
			Laporan prosentase pengalihan pemakaian minyak tanah ke LPG	1 lap	5 lap ^{KJ}			20,11
16	Pembinaan dan Penyelenggaraan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi	Meningkatnya pengelolaan, pengusahaan dan pembinaan usaha hulu minyak dan gas bumi dan CBM	Potensi Cadangan Minyak dan Gas Bumi dan CBM			Pengelolaan dan Penyediaan Minyak dan Gas Bumi	KESDM	3,50
			Jumlah laporan evaluasi cadangan migas dan CBM	1 lap	5 lap ^{KJ}			

KEBIJAKAN LINTAS BIDANG: Perubahan Iklim Global

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN SASARAN STRATEGIS (OUTCOME, OUTPUT YANG DIHARAPKAN)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
			a. Potensi Cadangan Minyak (MMSTB)	8.363,19	8.651,18			
			b. Potensi Cadangan Gas Bumi (TSCF)	170,7	172			
			c. Potensi Cadangan CBM (TSCF)	-	24			
			Jumlah Sumber Daya Minyak dan Gas Bumi dan CBM	163,64 BBOE	190,76 BBOE			6,25
			Jumlah laporan sumber daya migas dan CBM di seluruh cekungan Indonesia	1 lap	5 lap ^{k)}			
			Jumlah persetujuan Plan of Development (POD) I	2	37 ^{k)}			6,59
			Jumlah persetujuan harga gas bumi	15	78 ^{k)}			7,69
			Jumlah persetujuan amandemen dan atau perpanjangan kontrak	3	15 ^{k)}			2,00
			Jumlah persetujuan Participating Interest (PI) kepada BUMD atau perusahaan nasional terkait dengan POD I.	2	21 ^{k)}			2,37

KEBIJAKAN LINTAS BIDANG: Perubahan Iklim Global

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN SASARAN STRATEGIS (OUTCOME, OUTPUT YANG DIHARAPKAN)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
			Prosentase pengembangan dan pemanfaatan gas bumi.	97%	99%			4,52
			Prosentase penyerahan data minyak dan gas bumi dan CBM.	90%	95%			4,42
			Prosentase pengelolaan data dan informasi bidang eksplorasi dan eksploitasi migas.	90%	95%			5,85
			Prosentase perkembangan penanganan tumpang tindih lahan.	20%	60%			1,31
			Prosentase Pengelolaan, Pembahasan dan Evaluasi Laporan Kegiatan KKKS dari BPMIGAS.	100%	100%			5,52

KEBIJAKAN LINTAS BIDANG: Perubahan Iklim Global

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN SASARAN STRATEGIS (OUTCOME, OUTPUT YANG DIHARAPKAN)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
17	Penyediaan dan pengelolaan energi baru terbarukan dan pelaksanaan konservasi energi	Terwujudnya penyediaan dan pengelolaan energi baru terbarukan dan konservasi energi	Kapasitas terpasang pembangkit listrik dari sumber energi mikro hidro (MW)	1,53	11,94	Pengelolaan Listrik dan Pemanfaatan Energi	KESDM	68,96
			Kapasitas terpasang pembangkit listrik dari sumber energi surya (MWp)	3,55	24,78			492,57
			Kapasitas terpasang pembangkit listrik dari sumber energi angin (MW)	0,00	5,64			
			Kapasitas pembangkit dari sumber energi biomassa (MW)	0	0,1			
			Jumlah desa mandiri energi (desa)	50	250 ^{k)}			300,00
			Jumlah studi kelayakan dan pilot project energi laut (studi & pilot)	1 studi	5 studi & 10 pilot ^{k)}			30,00
			Jumlah gedung dan industri yang menerima layanan audit energi (objek)	185	370 ^{k)}			115,39
			Jumlah regulasi di bidang energi baru terbarukan (buah)	4	10 ^{k)}			9,26
			Jumlah regulasi di bidang efisiensi energi (buah)	3	12 ^{k)}			3,80

KEBIJAKAN LINTAS BIDANG: Perubahan Iklim Global

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN SASARAN STRATEGIS (OUTCOME, OUTPUT YANG DIHARAPKAN)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
18	Pembinaan dan Pengusahaan Panas Bumi dan Air Tanah	Tercapainya target PNBP dari sektor panas bumi	- Verifikasi/ inventarisasi/ rekonsiliasi/ sosialisasi kajian PNBP bidang pertambangan panas bumi	1 pkt	5 pkt ^{k)}	Pembinaan Dan Pengusahaan Mineral, Batubara, Panas Bumi Dan Air Tanah	KESDM	18,77
			Jumlah pemanfaatan langsung energi panas bumi	0	5 ^{k)}			
		Tercapainya target pemanfaatan langsung panas bumi	- Pelaksanaan penugasan survei pendahuluan untuk meningkatkan status potensi	6	30 ^{k)}			4,61
		Tersedianya data potensi panas bumi yang menarik bagi investor	- Inventarisasi pajak air tanah (provinsi)	6	33 ^{k)}			10,47
			Jumlah inventarisasi pajak air tanah (provinsi)	6	33 ^{k)}			

KEBIJAKAN LINTAS BIDANG: Perubahan Iklim Global

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN SASARAN STRATEGIS (OUTCOME, OUTPUT YANG DIHARAPKAN)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
19	Penyelidikan dan Pelayanan Sumber Daya Geologi	Meningkatnya pemanfaatan wilayah keprospekaan sumber daya geologi	Jumlah lokasi Penyelidikan status keprospekaan sumber daya Panas bumi	22	110 ^{k)}	Penelitian, Mitigasi Dan Pelayanan Geologi	KESDM	154,71
			Jumlah lokasi Penyelidikan status keprospekaan sumber daya Batubara dan CBM	18	90 ^{k)}			480,73
			Jumlah lokasi Penyelidikan status keprospekaan sumber daya Gambut dan Bitumen Padat	5	25 ^{k)}			16,58
			Jumlah lokasi Penyelidikan status keprospekaan sumber daya mineral	28	144 ^{k)}			88,41
KEGIATAN PENDUKUNG								
BIDANG ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI								
1	Penguatan Kebijakan Iptek dan Dukungan Litbang untuk Penurunan Emisi Gas CO2 dan Adaptasi Perubahan Iklim	Kebijakan dukungan litbang untuk penurunan emisi gas CO2 dan adaptasi perubahan iklim	Jumlah kebijakan	5	25 ^{k)}	Peningkatan Kemampuan IPTEK untuk Penguatan Sistem Inovasi Nasional	KRT	49,00
			Jumlah riset bersama	5	25 ^{k)}			
2	Teknologi Pengendalian dan Mitigasi Dampak Pemanasan Global	Model fisik kolamkultur penyerapan CO2, penyempurnaan dan pengujian peralatan produksi flare	Rekomendasi kebijakan pengurangan emisi dan peningkatan carbon sink dan Pilot Plant Fotobioreaktor untuk penyerap CO2	1	5 ^{k)}	Pengkajian dan Penerapan Teknologi	BPPT	14,85

KEBIJAKAN LINTAS BIDANG: Perubahan Iklim Global

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN SASARAN STRATEGIS (OUTCOME, OUTPUT YANG DIHARAPKAN)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
3	Penelitian Geoteknologi	Dokumen ilmiah kontribusi Indonesia untuk perubahan iklim	Paket pengumpulan data	1	1 K)	Penelitian, Penguasaan, dan Pemanfaatan IPTEK	LIPI	10,00
			Paket dokumen ilmiah		1 K)			
4	Pengembangan Konservasi Tumbuhan Indonesia – Kebun Raya Bogor	Konservasi ex-situ dalam bentuk kebun raya daerah	Kebun raya (paket kawasan)	2	14 K)	Penelitian, Penguasaan, dan Pemanfaatan IPTEK	LIPI	25,00
BIDANG SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP								
1	Pengelolaan Meteorologi Publik BMKG	Meningkatnya pelayanan data dan informasi meteorologi publik serta peringatan dini cuaca ekstrim	Persentase Tingkat Kemampuan pelayanan data dan informasi meteorologi publik	50%	80%	Pengembangan dan Pembinaan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika	BMKG	899,67
			Persentase Tingkat Kemampuan pelayanan data dan informasi potensi kebakaran hutan	50%	80%			
			Persentase Tingkat Kemampuan pelayanan data dan informasi cuaca ekstrim	50%	80%			

KEBIJAKAN LINTAS BIDANG: Perubahan Iklim Global

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN SASARAN STRATEGIS (OUTCOME, OUTPUT YANG DIHARAPKAN)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
2	Pengelolaan Iklim Agroklimat dan Iklim Maritim BMKG	Meningkatnya kualitas dan kuantitas Pelayanan data dan informasi di bidang Iklim Agroklimat dan Iklim Maritim	Jumlah pelayanan informasi perubahan iklim dan kualitas udara Persentase pengguna informasi perubahan iklim dan kualitas udara	75% 75%	95% 90%	Pengembangan dan Pembinaan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika	BMKG	151,56
3	Pengelolaan Gempa Bumi dan Tsunami BMKG	Tersedianya kebijakan teknis dalam penanganan penyediaan informasi gempa bumi dan tsunami	Kesinambungan (sustainabilitas) Ina-TEWS Kesinambungan sistem pengamatan di bidang gempabumi dan tsunami Kesinambungan sistem analisa data di bidang gempabumi dan tsunami	100% 90% 90%	100% 90% 90%	Pengembangan dan Pembinaan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika	BMKG	515,04
3	Pengelolaan Perubahan Iklim dan Kualitas Udara BMKG	Tersedianya pelayanan data dan informasi di bidang perubahan iklim dan kualitas udara, serta kerjasama di tingkat nasional dan internasional terkait kegiatan di bidang perubahan iklim dan kualitas udara	Jumlah pelayanan informasi iklim agroklimat dan iklim maritim	70%	90%	Pengembangan dan Pembinaan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika	BMKG	46,00

KEBIJAKAN LINTAS BIDANG: Perubahan Iklim Global

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN SASARAN STRATEGIS (OUTCOME, OUTPUT YANG DIHARAPKAN)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
			Persentase pengguna informasi perubahan iklim dan kualitas udara	65%	90%			
4	Pengelolaan Meteorologi Penerbangan dan Maritim BMKG	Meningkatnya kualitas, kuantitas dan jangkauan pelayanan data, informasi dan jasa di bidang meteorologi penerbangan dan maritim	Persentase tingkat kemampuan pelayanan data dan informasi meteorologi maritim	40%	85%	Pengembangan dan Pembinaan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika	BMKG	395,35
			Persentase tingkat kemampuan pelayanan data dan informasi meteorologi penerbangan	40%	85%			
			Frekuensi pelayanan informasi meteorologi maritim	365	1460			
			Ketersediaan data meteorologi	680	890			

KEBIJAKAN LINTAS BIDANG: Perubahan Iklim Global

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN SASARAN STRATEGIS (OUTCOME, OUTPUT YANG DIHARAPKAN)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
5	Pengelolaan Seismologi Teknik, Geofisika Potensial dan Tanda Waktu BMKG	Tersedianya sarana dan prasarana untuk pengelolaan data dan informasi bidang seismologi teknik, geofisika potensial dan tanda waktu	Tersedianya peralatan pengamatan seismoteknik, geopotensial dan tanda waktu	40	300 ^{ko}	Pengembangan dan Pembinaan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika	BMKG	62,48
			Kesinambungan (sustainabilitas) sistem pengamatan, analisa, dan pelayanan dalam bidang seismoteknik, geopotensial, dan tanda waktu	90%	90%			
			Tersedianya data dan informasi dalam bentuk peta secara kumulatif dan bulletin di bidang seismoteknik, geopotensial, dan tanda waktu	90%	90%			
6	Pengelolaan Instrumentasi, Rekayasa dan Kalibrasi BMKG	Tersedianya kebijakan teknis bidang instrumentasi, rekayasa dan kalibrasi	Jumlah kebijakan teknis instrumentasi, rekayasa dan kalibrasi yang disusun	17	107 ^{ko}	Pengembangan dan Pembinaan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika	BMKG	172,92
			Persentase informasi pengelolaan instrumentasi, rekayasa dan kalibrasi secara maksimal	10%	30%			

KEBIJAKAN LINTAS BIDANG: Perubahan Iklim Global

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN SASARAN STRATEGIS (OUTCOME, OUTPUT YANG DIHARAPKAN)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
7	Pengelolaan Jaringan Komunikasi BMKG	Tersedianya kebijakan teknis bidang jaringan komunikasi	Jumlah kebijakan teknis jaringan komunikasi yang disusun	63%	100%	Pengembangan dan Pembinaan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika	BMKG	127,93
			Persentase informasi pengelolaan jaringan komunikasi	90%	90%			
8	Pengelolaan Data Base BMKG	Tersedianya mekanisme yang mengatur ketersediaan dan pengelolaan database	Jumlah kebijakan database yang disusun	11	86 ^{ko}	Pengembangan dan Pembinaan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika	BMKG	68,00
			Persentase informasi pengelolaan database secara maksimal	20%	100%			
9	Pengembangan UPT BMKG	Terbinanya pelaksanaan UPT BMKG	Persentase Pembinaan dan pengembangan UPT BMKG seluruh Indonesia	80%	90%	Pengembangan dan Pembinaan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika	BMKG	688,69

KEBIJAKAN LINTAS BIDANG: Perubahan Iklim Global

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN SASARAN STRATEGIS (OUTCOME, OUTPUT YANG DIHARAPKAN)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
10	Penelitian dan Pengembangan BMKG	Terselenggaranya penelitian dan pengembangan bidang meteorologi, klimatologi, kualitas udara dan geofisika	Jumlah penelitian dan pengembangan bidang meteorologi	0	75 ^{K)}	Dukungan Manajemen Dan Tugas Teknis Lainnya BMKG	BMKG	81,72
			Jumlah penelitian dan pengembangan bidang klimatologi	0	40 ^{K)}			
			Jumlah penelitian dan pengembangan bidang kualitas udara	0	16 ^{K)}			
			Jumlah penelitian dan pengembangan bidang geofisika	0	92 ^{K)}			
			Jumlah penelitian dan pengembangan yang digunakan dalam operasional	0	51 ^{K)}			
			Jumlah penelitian dan pengembangan yang di publikasikan	0	30 ^{K)}			
			Jumlah kerjasama penelitian dan pengembangan	0	34 ^{K)}			
TOTAL								110.270,37

**RENCANA TINDAK PRIORITAS LINTAS BIDANG
KELAUTAN BERDIMENSI KEPULAUAN**

NO	FOKUS PRIORITAS /KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil Outcomes/Output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
BIDANG ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI								
1	Penelitian Oceanografi	Data potensi bahan obat dari makro algae dan sponge; biota laut di ekosistem terumbu karang; abalon, dan rajungan; serta sistem informasi oseanografi	Publikasi makalah	37	58	Program Penelitian, Penguasaan, dan Pemanfaatan IPTEK	LIPI	62,0
			Proto tipe	7	10			
			Konsep	6	8			
			Pengembangan Sistem Informasi dan penelitian Kerusakan terumbu karang	3	3			
		Paket informasi dasar					67,4	
BIDANG SARANA DAN PRASARANA								
2	Pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan di bidang Kenavigasian	Terbanggunya sarana bantu navigasi pelayaran (SBNP) terdiri 93 menara suar; 185 rambu suar; 153 pelampung suar	unit (menara suar; rambu suar; pelampung suar)	18; 23 ; 30	SBNP terdiri 93 ^{K)} menara suar; 185 rambu suar; 153 pelampung suar	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut	Kemen. Perhubungan	1.127,6
			Terbanggunya dan meningkatnya SBNP di wilayah Indonesia sebanyak 71 tower mensu, 215 unit lampu suar, 50 unit buoy	-	71 ; 215 ; 50 ^{K)}			
			Tersedianya 922 unit suku cadang SBNP	170	922 ^{K)}			
			Terbanggunya gedung SROP dan sistem telekomunikasi pelayaran sebanyak 188 SROP (Sistem Radio Operasi Pantai)	42	188 ^{K)}			
		Tersedianya 600 unit perangkat radio	200	600 ^{K)}			54,0	
		Terpasangnya 39 paket <i>Vessel Traffic System</i> di Selat Sunda, Lombok, Selat Malaka, ALKI lainnya	15	39 ^{K)}			1.025,0	
		Tersedianya 22 unit Suku Cadang SROP	5	22 ^{K)}			44,0	
		10 unit CCTV	5	10 ^{K)}			18,0	
		15 unit AIS (<i>Automatic Identification System</i>)	7	15 ^{K)}			11,3	
		Terbanggunya 7 dermaga kapal kenavigasian	2	7 ^{K)}			55,0	
		Tersedianya 15 unit Inspection boat-navigasi	1	15 ^{K)}			120,0	

NO	FOKUS PRIORITAS /KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil Outcomes/Output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
3	Pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan di Bidang Penjagaan Laut dan Pantai	Tersedianya 72 unit kapal patroli KPLP (Kesatuan Penjaga Laut dan Pantai)	unit kapal patroli	22	72 ^{K)}	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut	Kemen. Perhubungan	1.516,0
4	Pengelolaan dan Penyelenggaraan kegiatan di bidang Perkapalan dan Kelautan	Tersedianya 29 unit kapal <i>Marine Surveyor</i>	unit kapal Marine Surveyor	9	29 ^{K)}	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut	Kemen. Perhubungan	23,9
5	Pengelolaan dan Penyelenggaraan kegiatan di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Laut	Tersedianya 32 unit kapal penumpang	Unit	2	32 ^{K)}	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut	Kemen. Perhubungan	1.493,8
		Tersedianya 2 unit kapal penumpang	unit	-	2 ^{K)}			1.300,0
		Tersedianya 76 Trayek subsidi perintis di wilayah terpencil	Trayek	60	76			2.135,0
6	Pengelolaan dan Penyelenggaraan kegiatan di bidang Pelabuhan dan Pelayaran	Tersedianya alur pelayaran yang aman untuk kapal melalui pengerukan 61.7150.00 m3 sedimen	volume lumpur/sedimen yang dikeruk (juta m3)	6	21 ^{K)}	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut	Kemen. Perhubungan	880,00
		Optimalnya fungsi Sarana dan fasilitas 25 pelabuhan strategis Lhoksemawe, Belawan, Teluk Bayur, Dumai, Pekan Baru, Palembang, Panjang, Batan, Tg.Pinang, Tg.Priok, Tg.Emas, Tg.Perak, Cigading, Benoa, Kupang, Pontianak, Banjarmasin, Samarinda, Balikpapan, Bitung, Makasar, Sorong, Ambon, Biak dan Jayapura.	Jumlah lokasi yang dibangun dan di rehab	5 Lokasi	25 lokasi ^{K)}	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut	Kemen. Perhubungan	4.792,0
		Pengembangan Pelabuhan Tanjung Priok	lokasi	-	1 lokasi			1.500,0
		Pengembangan Pelabuhan Belawan-Medan	lokasi	-	1 lokasi			2.000,0
		Meningkatnya kapasitas 125 pelabuhan non perintis	Jumlah pelabuhan yang direhabilitasi/ditingkatkan/dibangun	25 Lokasi	125 lokasi ^{K)}			1.750,0
		Meningkatnya jumlah dan kapasitas pelabuhan perintis	Jumlah pelabuhan yang direhabilitasi/ditingkatkan/dibangun	30 Lokasi	150 lokasi ^{K)}			1.750,0
7	Pelayanan Angkutan Udara Perintis	115 rute perintis	Jumlah rute perintis yang terlayani	118	115 ^{K)}	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara	Kemen. Perhubungan	892,4
		19.006 drum BBM		3.766	19.006 ^{K)}			39,7

NO	FOKUS PRIORITAS /KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil Outcomes/Output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
8	Penyediaan dan Pengelolaan Energi Baru Terbarukan dan Pelaksanaan Konservasi Energi	Terwujudnya penyediaan dan pengelolaan energi baru terbarukan dan konservasi energi	Kapasitas terpasang pembangkit listrik dari sumber energi surya (MWp) Jumlah studi kelayakan dan pilot project energi laut (studi dan pilot)	3,55	102 ^{K)}	Program Pengelolaan Listrik dan Pemanfaatan Energi	KESDM	492,57
				1 studi	1 studi dan 4 pilot			30,00
9	Optimalisasi Diplomasi terkait dengan Perjanjian Politik, Keamanan, Kewilayahan dan Kelautan	Terselenggaranya penguatan diplomasi melalui optimalisasi perjanjian politik, keamanan, kewilayahan dan kelautan	1. Jumlah telaahan dalam proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan politik luar negeri	14 telaahan	70 telaahan ^{K)}	Program Optimalisasi Diplomasi Terkait dengan Pengelolaan Hukum dan Perjanjian Internasional	Kemenlu	64,2
			2. Jumlah telaahan terhadap persoalan-persoalan hukum internasional	13 telaahan	65 telaahan ^{K)}			
			3. Jumlah pelaksanaan ratifikasi, penerapan hukum, penyelesaian sengketa hukum, dan perjanjian internasional	6 Kali	30 kali ^{K)}			
			4. Jumlah standar, norma, pedoman, kriteria, prosedur, dan pemberian bimbingan teknis, serta evaluasi pembuatan perjanjian internasional	49 dokumen	245 dokumen ^{K)}			
			5. Jumlah pelaksanaan perundingan yang terkait dengan pembuatan perjanjian bilateral, regional, dan multilateral antara RI-Malaysia, Filipina, Singapura, Timor Leste, Vietnam, dan Palau	12 kali Perundingan	60 kali ^{K)}			
			6. Tersusunnya dokumen tentang <i>Ocean Policy</i>	Penyusunan Rancangan Dokumen tentang <i>Ocean Policy</i>	Tersedianya dokumen tentang <i>Ocean Policy</i>			
BIDANG PERTAHANAN KEAMANAN								
10	Penyelenggaraan OMSP Matra Udara	Peningkatan penyelenggaraan operasi militer selain perang Matra Udara dan penegakan hukum serta penjagaan keamanan di wilayah yuridiksi nasional	Jumlah dan cakupan wilayah penyelenggaraan OMSP Matra Udara	30%	35%	Program Dukungan Kesiapan Matra Udara	TNI AU	5,6

NO	FOKUS PRIORITAS /KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil Outcomes/Output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
11	Peningkatan Operasi Bersama Keamanan Laut	Menurunnya angka pelanggaran hukum di Laut	Menurunnya angka pelanggaran hukum di Laut (paket)	3	23 ^{K)}	Program Peningkatan Koordinasi Keamanan dan Keselamatan di Laut	Bakorkamla	232,0
12	Peningkatan Koordinasi Pengawasan Keamanan laut	Meningkatnya efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pengawasan keamanan laut	Penyelesaian sistem early warning dan sea surveillance termasuk integrasinya	15%	100%	Program Peningkatan Koordinasi Keamanan dan Keselamatan di Laut	Bakorkamla	585,4
13	Pembinaan Kepolisian Perairan	Meningkatkan keamanan perairan pantai dan sungai; Terpeliharanya peralatan dan pendukungnya hingga siap pakai	Jumlah prosentase gangguan keamanan yang menurun pada jalur aktivitas masyarakat yg menggunakan moda transportasi laut .	10%	11%	Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban masyarakat	POLRI	71,3
BIDANG WILAYAH								
14	Pemetaan Dasar Kelautan dan Kedirgantaraan	Kebijakan pemetaan dasar kelautan dan kedirgantaraan serta meningkatnya cakupan peta dasar kelautan dan kedirgantaraan.	Kualitas kerjasama, sinergi, koordinasi, program dan kegiatan, serta diseminasi data spasial kelautan dan kedirgantaraan nasional.	2	10 ^{K)}	Program Survei dan Pemetaan Nasional	Bakosurtanal	109,7
			Survei batimetri lepas pantai line km	13.680	68.400 ^{K)}			
			Jumlah liputan data spasial batimetri, Pantai (LPI) dalam ln km	34.000	265.000 ^{K)}			
			Percepatan Survei Hidrografi pantai multibeam line km	30.000	225.000 ^{K)}			
			Jumlah NLP Peta LPI skala 1:25K, 1:50K, 1:250K dan LLN 1:500K	52	292 ^{K)}			
			Jumlah liputan peta dasar kelautan dan kedirgantaraan dan basis data kelautan dan kedirgantaraan	1	5 ^{K)}			
			Pemutakhiran peta dasar kelautan dan kedirgantaraan serta basis data kelautan dan kedirgantaraan	4	41 ^{K)}			
			Pembuatan Peta LBI	2	15 ^{K)}			
			Pembuatan peta navigasi udara (Aeronautical Chart)	8	51 ^{K)}			
			Peta Resmi tingkat peringatan tsunami	2	16 ^{K)}			

NO	FOKUS PRIORITAS /KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil Outcomes/Output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
15	Peningkatan Ketersediaan Data dan Informasi Survei Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Matra Laut.	Tersedianya data dan informasi spasial SDA dan LH tematik matra laut.	Jumlah dokumen rumusan kebijakan dan NSPK survei SDA dan LH tematik matra laut Jumlah produk inventarisasi, neraca, kajian aplikasi tekno surta, remote sensing/GIS, dinamika geografis SDA dan kajian wilayah LH matra laut yang diatur dan dikelola sebagai basis data pemetaan nasional Jumlah akses, diseminasi dan utilitas informasi data spasial tematik SDA dan LH matra laut	1 18 NLP(@5 tema) dan 4 dok 33 Prov, 6 K/L	5 ^{Kj} 90 NLP(@5 tema) dan 20 dok 33 Prov, 6 K/L	Program Survei dan Pemetaan Nasional	Bakosurtanal	66,4
BIDANG SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP								
16	Peningkatan Konservasi dan Pengendalian Kerusakan Ekosistem Pesisir dan Laut	Meningkatnya kualitas kebijakan konservasi dan pengendalian kerusakan ekosistem pesisir dan laut	Jumlah kajian, rekomendasi, dan kebijakan peningkatan konservasi dan pengendalian kerusakan pesisir dan laut yang ditetapkan (per tahun) % capaian inventarisasi data kerusakan ekosistem pesisir dan laut dengan basis jumlah kabupaten yang memiliki pesisir [akumulatif] Jumlah daerah yang diverifikasi tingkat kerusakan ekosistem dan kualitas lingkungan (per tahun) Jumlah model implementasi kebijakan di regional	3 10% 5 5	19 ^{Kj} 50% 41 ^{Kj} 25 ^{Kj}	Program Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	KLH	75,9
17	Pengelolaan Meteorologi Penerbangan dan Maritim BMKG	Meningkatnya kualitas, kuantitas dan jangkauan pelayanan data, informasi dan jasa di bidang meteorologi penerbangan dan maritim	Persentase Tingkat kemampuan Pelayanan Data dan Informasi Meteorologi Maritim Persentase Tingkat Kemampuan Pelayanan Data dan Informasi Meteorologi Penerbangan Frekuensi Pelayanan Informasi Meteorologi Maritim Ketersediaan data meteorologi	40% 40% 365 680	85% 85% 4.380 ^{Kj} 3.875 ^{Kj}	Pengembangan dan Pembinaan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika	BMKG	395,4

NO	FOKUS PRIORITAS /KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil Outcomes/Output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
18	Penelitian dan Pengembangan Geologi Kelautan	Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan geologi kelautan	Jumlah kegiatan penelitian dan pengembangan	13	17	Program Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral	KESDM	125,3
19	Pengelolaan Sumber Daya Ikan (SDI)	Meningkatnya Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) yang terjamin ketersediaan sumber daya ikan dengan data dan pengelolaan pemanfaatan yang terintegrasi, akurat, tepat waktu.	• Jumlah lokasi pemantauan dan evaluasi perlindungan dan pengkayaan SDI	6 prov	33 prov	Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap	KKP	354,6
			• Jumlah ekosistem PUD yang teridentifikasi (8 prov per tahun)	8 prov	40 prov ^{K)}			
			• Jumlah perairan teritorial dan kepulauan yang teridentifikasi sumber dayanya	1 WPP	11 WPP 33 prov			
			• Jumlah ZEEI yang teridentifikasi sumber dayanya	11 prov	27 prov ^{K)}			
20	Pembinaan dan Pengembangan Kapal Perikanan, Alat Penangkap Ikan, dan Pengawakan Kapal Perikanan	Terwujudnya kecukupan kapal perikanan Indonesia (yang laik laut, laik tangkap dan laik simpan), alat penangkap ikan (yang sesuai SNI) dan pengawakan yang memenuhi standar di setiap WPP	Jumlah dan jenis kapal penangkap ikan yang memenuhi standar laik laut, laik tangkap dan laik simpan	500 unit	700 unit	Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap	KKP	384,0
			Jumlah alat penangkap ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang memenuhi standar	600 unit	2,929 unit			
			Jumlah awak kapal perikanan yang memenuhi standar kompetensi	60 orang	240 orang			
21	Pengembangan Pembangunan dan Pengelolaan Pelabuhan Perikanan	Meningkatnya pembangunan dan pencapaian standar pelayanan prima di pelabuhan perikanan dengan fasilitas penunjang produksi, pengolahan, pemasaran dan kesyahbandaran yang sesuai standar.	Jumlah pelabuhan perikanan dengan fokus pembangunan di lingkaran luar dan daerah perbatasan yang potensial	968 unit	988 unit	Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap	KKP	6.084,8
			Jumlah penyiapan pembangunan pelabuhan perikanan sesuai dengan rencana induk	35 Lokasi	190 Lokasi ^{K)}			
			Jumlah pelabuhan perikanan yang mempunyai Wilayah Kerja Operasional Pelabuhan Perikanan (WKOPP)	10	50			

NO	FOKUS PRIORITAS /KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil Outcomes/Output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
22	Pelayanan Usaha Perikanan Tangkap yang Efisien, Tertib, dan Berkelanjutan	Meningkatnya pelayanan prima dan ketertiban usaha perikanan tangkap sesuai ketersediaan SDI di setiap WPP secara akuntabel dan tepat waktu.	Jumlah keabsahan dan kelengkapan dokumen usaha perikanan tangkap	8.000 SIUP, SIPI/SIKPI	12.000 SIUP, SIPI/SIKPI	Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap	KKP	200,9
			Jumlah pelaku usaha perikanan tangkap yang memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan yang berlaku	2.500	4.500			
			Jumlah kapal dan jenis alat penangkap ikan yang diperbolehkan sesuai dengan ketersediaan sumber daya ikan di setiap WPP	4.900 SIPI	8.900 SIPI			
23	Pengembangan Usaha Penangkapan Ikan dan Pemberdayaan Nelayan Skala Kecil	Jumlah kawasan potensi perikanan tangkap yang menjadi kawasan Minapolitan dengan usaha yang bankable serta realisasi investasi usaha perikanan tangkap.	Jumlah kawasan minapolitan potensi perikanan tangkap yang memiliki Kelompok Usaha Bersama (KUB) yang Mandiri.	1 PP 5 PPI	1 PP 5 PPI	Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap	KKP	424,1
			Jumlah Kelompok Usaha Bersama (KUB) yang Mandiri.	999 KUB	1.800 KUB			
			Jumlah usaha perikanan tangkap yang memenuhi kelayakan usaha dan bankable	999 KUB	1.800 KUB			
24	Pengembangan Sistem Produksi Pembudidayaan Ikan	Meningkatnya produksi perikanan budidaya dengan mutu terjamin dan data akurat.	Jumlah produksi perikanan budidaya air tawar.	1,4 juta ton	4,6 juta ton	Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap	KKP	620,8
			Jumlah produksi perikanan budidaya air payau.	1.137.920 ton	2.022.220 ton			
			Jumlah produksi perikanan budidaya laut	2.846.475 ton	10.288.175 ton			
			Jumlah usaha perikanan budidaya yang bersertifikat dan memenuhi standar.	1.000 unit	7.000 unit			

NO	FOKUS PRIORITAS /KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil Outcomes/Output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
25	Pengembangan Sistem Perbenihan Ikan	Terpenuhinya kebutuhan benih untuk produksi dan pasar dengan mutu terjamin dan data akurat.	Jumlah produksi induk unggul.	6,5 juta ekor induk	52,2 juta ekor ^{K)} induk	Program peningkatan produksi perikanan budidaya	KKP	534,3
			Jumlah unit perbenihan yang bersertifikat dan benih yang memenuhi standar	267.280 ton	2,7 juta ton ^{K)}			
26	Pengembangan Sistem Kesehatan Ikan dan Lingkungan Pembudidayaan Ikan	Kawasan perikanan budidaya yang sehat serta produk perikanan yang aman dikonsumsi.	Jumlah laboratorium uji yang memenuhi standar teknis.	Lab. Kualitas air : 25 unit	Lab. Kualitas air : 48 unit	Program peningkatan produksi perikanan budidaya	KKP	678,3
				Lab. HPI (hama penyakit ikan) : 20 unit	Lab. HPI : 35 unit			
				Lab. Residu : 9 unit	Lab. Residu : 25 unit			
			Jumlah kawasan perikanan budidaya yang sehat serta persentasi jenis biota perairan yang dikonservasi.	350 kab	450 kab			
27	Pengembangan Sistem Usaha Pembudidayaan Ikan	Kawasan potensi perikanan budidaya menjadi kawasan Minapolitan dengan usaha yang <i>bankable</i> .	Jumlah kelompok usaha perikanan budidaya yang memenuhi standar kelembagaan dan jumlah tenaga kerja yang memiliki kompetensi.	157 kelompok	3.388 kelompok	Program peningkatan produksi perikanan budidaya	KKP	466,4
				394 orang	2.364 orang			
			Jumlah usaha perikanan budidaya yang memperoleh SNI serta jumlah lembaga sertifikasi yang terakreditasi	19 Lab uji; 3 LSSM (lembaga sertifikasi sistem mutu)	43 Lab uji; 15 LSSM			

NO	FOKUS PRIORITAS /KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil Outcomes/Output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
28	Pengembangan Sistem Prasarana dan Sarana Pembudidayaan Ikan	Kawasan perikanan budidaya yang memiliki prasarana dan sarana sesuai kebutuhan.	Luas lahan budidaya sesuai target produksi disertai data potensi yang akurat.	1.115.666 Ha, 70 potensi kawasan	1.365.416 Ha, 150 potensi kawasan	Program peningkatan produksi perikanan budidaya	KKP	667,5
29	Pengawasan dan Penerapan Teknologi Terapan Adaptif Perikanan Budidaya	Sentra produksi perikanan budidaya yang memiliki komoditas unggulan dan menerapkan teknologi inovatif.	Persentase unit usaha yang mendapatkan pelayanan sertifikasi sesuai standar dengan informasi yang akurat.	100%	100%	Program peningkatan produksi perikanan budidaya	KKP	1.109,5
30	Pengelolaan dan Pengembangan Konservasi Kawasan dan Jenis	Terkelolanya 20% kawasan ekosistem terumbu karang, lamun, mangrove dan 15 jenis biota perairan yang terancam punah	kawasan konservasi laut dan kawasan konservasi perairan tawar dan payau yang dikelola secara berkelanjutan seluas 4,5 juta ha	900 ribu ha	4,5 juta ha ^{K)}	Program Pengelolaan Sumber Daya Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	KKP	745,4
			Jumlah kawasan konservasi dan jenis biota perairan dilindungi yang diidentifikasi dan dipetakan secara akurat.	9 Kawasan dan 3 jenis	9 Kawasan dan 3 jenis			
31	Penataan Ruang dan Perencanaan Pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil	Tersedianya 145 rencana zonasi nasional/ provinsi/ kabupaten/ kota, 50 masterplan minapolitan, 30 masterplan kluster pulau-pulau kecil bernilai ekonomi tinggi serta 12 master plan kawasan sentra produksi kelautan	Jumlah kawasan laut dan pesisir yang memiliki peta potensi dan arahan pemanfaatan yang terintegrasi, akuntabel dan terkini	6 kawasan	50 kawasan ^{K)}	Program Pengelolaan Sumber Daya Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	KKP	481,1
			Jumlah kawasan pulau-pulau kecil yang memiliki peta potensi dan arahan pemanfaatan yang terintegrasi, akuntabel dan terkini	23 kawasan	145 kawasan ^{K)}			

NO	FOKUS PRIORITAS /KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil Outcomes/Output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
32	Pendayagunaan Pesisir dan Lautan	Terkelolanya 50 Kawasan minapolitan yang tahan terhadap ancaman kerusakan dan mempunyai infrastruktur dasar, serta 3 produk kelautan	Jumlah luasan kawasan pesisir rusak yang pulih kembali.	60 ha	5.000 ha ^{K)}	Program Pengelolaan Sumber Daya Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	KKP	404,5
			Jumlah ragam dan volume produk kelautan yang dikembangkan pada kawasan pesisir dan lautan.					
			- BMKT	2 kapal	12 kapal ^{K)}			
			- Garam	50 ribu ton	500 ribu ton ^{K)}			
		- <i>Deep sea water</i>	200 ribu liter	7,2 juta liter ^{K)}				
33	Pendayagunaan Pulau-Pulau Kecil	Terwujudnya 200 pulau kecil yang memiliki infrastruktur mamadai, ekosistem baik, siap terhadap bencana, dan 25 di antaranya terinvestasi	Jumlah pulau kecil yang diidentifikasi dan dipetakan potensinya secara akurat termasuk pulau-pulau kecil terluar	20 pulau	205 pulau ^{K)}	Program Pengelolaan Sumber Daya Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	KKP	578,5
			Jumlah pulau kecil yang memiliki infrastuktur memadai secara terintegrasi termasuk pulau-pulau kecil terluar	20 pulau	205 pulau ^{K)}			

NO	FOKUS PRIORITAS /KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil Outcomes/Output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
34	Peningkatan Operasional Pengawasan Sumber Daya Perikanan	Meningkatnya usaha perikanan yang sesuai ketentuan	Jumlah <i>usaha</i> penangkapan ikan di wilayah bagian barat yang sesuai ketentuan	280 kapal	2.680 kapal	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	KKP	170,1
			Jumlah usaha penangkapan ikan di wilayah bagian timur yang sesuai ketentuan	180 kapal	1.712 kapal			
35	Peningkatan Operasional Pengawasan Sumber Daya Kelautan	Meningkatnya wilayah perairan Indonesia yang bebas kegiatan <i>illegal</i> dan merusak	Jumlah wilayah perairan yang bebas kegiatan perusakan ekosistem perairan	4 wilayah	27 wilayah	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	KKP	87,0
			Jumlah wilayah perairan yang bebas kegiatan pencemaran	7 wilayah perairan	40 wilayah perairan			
36	Peningkatan Operasional dan Pemeliharaan Kapal Pengawas	Meningkatnya wilayah pengelolaan perikanan bebas <i>IUU fishing</i>	Jumlah wilayah pengelolaan perikanan bagian barat bebas IUU Fishing	3 WPP	5 WPP	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	KKP	1.617,3
			Jumlah wilayah pengelolaan perikanan bagian timur bebas IUU Fishing	6 WPP	6 WPP			

NO	FOKUS PRIORITAS /KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil Outcomes/Output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
37	Pengembangan Sarana dan Prasarana Pengawasan dan Pemantauan Kapal Perikanan	Terpenuhinya sarana dan prasarana pengawasan dengan rancang bangun dan sistem pemantauan yang terintegrasi dan tepat sasaran	Jumlah pemenuhan sarana pengawasan yang memadai secara terintegrasi, akuntabel dan tepat waktu			Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	KKP	536,9
			Kapal Pengawas	0	55 ^{K)}			
			Speedboat	15	137 ^{K)}			
			Stasiun Radar Satelit	0	0 ^{K)}			
			Transmitter VMS	0	1 ^{K)}			
			Pemenuhan prasarana pengawasan yang memadai secara terintegrasi, akuntabel dan tepat waktu					
			Kantor dan Bangunan Pengawas	5	30 ^{K)}			
			Dermaga	2	27 ^{K)}			
Pos Pengawas	15	70 ^{K)}						
38	Penyelesaian tindak pidana kelautan dan perikanan	Meningkatnya pelaku tindak pidana kelautan dan perikanan yang divonis secara akuntabel dan tepat waktu serta persentase penurunan tindak pidana kelautan dan perikanan	Jumlah Kapal yang diperiksa	4.000	40.164 ^{K)}	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	KKP	93,5
39	Penelitian dan Pengembangan IPTEK Kelautan	Rekomendasi dan inovasi teknologi perlindungan pantai, energy terbarukan, pengawasan, eksplorasi, eksploitasi, instrumentasi kelautan, maritim, mitigasi/adaptasi bencana dan perubahan iklim yang meningkatkan efisiensi pengelolaan sumber daya kelautan	Jumlah rekomendasi dan inovasi teknologi perlindungan, pengawasan, eksplorasi, eksploitasi, instrumentasi kelautan, maritim, mitigasi/adaptasi bencana dan perubahan iklim yang meningkatkan efisiensi pengelolaan sumber daya kelautan secara berkelanjutan	2	10 ^{K)}	Program Penelitian dan Pengembangan IPTEK Kelautan dan Perikanan	KKP	242,8
				9	45 ^{K)}			

NO	FOKUS PRIORITAS /KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil Outcomes/Output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
40	Penelitian dan Pengembangan IPTEK Kewilayahan, Dinamika dan Sumber Daya Nonhayati Pesisir dan Laut	Wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil yang teridentifikasi potensi, karakteristik, kebutuhan konservasi SDNHL dan fenomena alamnya serta jumlah rekomendasi pengelolaan dan model pemanfaatannya.	Jumlah rekomendasi pengelolaan dan model pemanfaatannya, serta Jumlah paket data terkait dengan fenomena alam dan sumber daya non hayati di wilayah pesisir ,laut, serta pulau-pulau kecil	Rekomendasi dan/atau model pemanfaatan: 3 1 paket data terkait fenomena alam laut, 5 paket data terkait SDNH, pesisir, dan laut	Rekomendasi dan/atau model pemanfaatan: 15 ^{K)} 5 paket data ^{K)} terkait fenomena alam laut, 25 paket data terkait SDNH, pesisir, dan laut	Program Penelitian dan Pengembangan IPTEK Kelautan dan Perikanan	KKP	260,7
41	Penelitian dan Pengembangan IPTEK Perikanan Tangkap	Wilayah perairan Indonesia yang teridentifikasi potensi produksi, karakteristik, kebutuhan konservasi SDInya serta jumlah inovasi teknologi dan rekomendasi pengelolaannya.	Jumlah rekomendasi pengelolaan	6 buah	23 buah ^{K)}	Program Penelitian dan Pengembangan IPTEK Kelautan dan Perikanan	KKP	413,0
42	Pendidikan kelautan dan Perikanan	Terpenuhinya tenaga terdidik kompeten sesuai standar dan kebutuhan serta prioritas nasional	Jumlah lulusan pendidikan yang kompeten sesuai standard dan kebutuhan serta prioritas nasional	1.400 orang	7000 orang ^{K)}	Program Pengembangan SDM kelautan dan Perikanan	KKP	963,4
43	Pelatihan kelautan dan Perikanan	Terselenggaranya pelatihan yang sesuai standar serta persentase lulusan yang meningkat kinerjanya sesuai standar kompetensi dan kebutuhan pasar	Jumlah lulusan pelatihan yang sesuai standar serta jumlah lulusan yang meningkat kinerjanya sesuai standar kompetensi dan kebutuhan pasar	6.160 masyarakat 1.103 aparatur	15.000 masyarakat 2.200 aparatur	Program Pengembangan SDM kelautan dan Perikanan	KKP	347,6
TOTAL								44.687,7

Keterangan :

^{K)} Angka kumulatif 5 tahun (2010-2014)

**RENCANA TINDAK PRIORITAS LINTAS BIDANG
PERLINDUNGAN ANAK**

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI 2010- 2014 (Rp Miliar)
				2010	2014			
1	Peningkatan kualitas tumbuh kembang dan kelangsungan hidup anak	meningkatnya akses dan kualitas layanan perlindungan anak	1. APK PAUD	56,70%	72,90%			217.891,1
			2. APS 7-12	97,90%	>99%			
			3. APS 13-15	87,90%	>95%			
			4. Persentase balita gizi buruk yang mendapat perawatan	100	100			
			5. Cakupan kunjungan neonatal pertama (KN1)	84	90			
			6. Persentase anak usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap	80	90			
1.1	Pembinaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Reproduksi ¹⁾	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan ibu dan Reproduksi	1. Persentase ibu bersalin yang ditolong oleh nakes terlatih (cakupan PN)	84	90	Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak	Kementerian Kesehatan	2.194,0
			2. Persentase ibu hamil yang mendapatkan penanganan antenatal (cakupan K4)	84	95			

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI 2010- 2014 (Rp Miliar)
				2010	2014			
1.2	Pembinaan Pelayanan Kesehatan Anak ¹⁾	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan anak	1. Cakupan kunjungan neonatal pertama (KN1)	84	90	Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak	Kementerian Kesehatan	1.723,0
			2. Cakupan pelayanan kesehatan bayi	84	90			
			3. Cakupan pelayanan kesehatan balita	78	85			
1.3	Pembinaan Gizi Masyarakat ¹⁾	Meningkatnya kualitas penanganan masalah gizi masyarakat	1. Persentase balita gizi buruk yang mendapat perawatan	100	100	Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak	Kementerian Kesehatan	2.804,2
			2. Persentase balita ditimbang berat badannya (D/S)	65	85			
1.4	Pembinaan Keperawatan dan Kebidanan ¹⁾	Meningkatnya pembinaan keperawatan dan kebidanan	Jumlah Puskesmas yang menerapkan pelayanan kebidanan sesuai standar dan pedoman	70	350	Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak	Kementerian Kesehatan	68,0
1.5	Pembinaan Imunisasi dan Karantina Kesehatan ¹⁾	Meningkatnya pembinaan di bidang imunisasi dan karantina kesehatan	Persentase anak usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap	80	90	Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan	Kementerian Kesehatan	1.205,9
1.6	Pengendalian Penyakit Menular Langsung ¹⁾	Menurunnya angka kesakitan dan kematian akibat penyakit menular langsung	Persentase penduduk 15 tahun ke atas menurut pengetahuan tentang HIV dan AIDS	65	95	Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan	Kementerian Kesehatan	1.237,3

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI 2010- 2014 (Rp Miliar)
				2010	2014			
1.7	Penyehatan Lingkungan ¹⁾	Meningkatnya penyehatan dan pengawasan kualitas lingkungan	Persentase penduduk yang memiliki akses terhadap air minum berkualitas	62	67	Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan	Kementerian Kesehatan	2.054,5
1.8	Pemberdayaan Masyarakat dan Promosi Kesehatan ¹⁾	Meningkatnya pelaksanaan pemberdayaan dan promosi kesehatan kepada masyarakat	Persentase rumah tangga yang melaksanakan PHBS	50	70	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Kementerian Kesehatan	895,8
1.9	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya di Ditjen Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak ¹⁾	Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya di Ditjen Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah poskesdes beroperasi	70.000	78.000	Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak	Kementerian Kesehatan	3.994,6
1.10	Penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja (PKBR) ¹⁾	Meningkatnya PSP remaja tentang PKBR	1. Persentase pengetahuan remaja tentang:	50	62	Program Kependudukan dan Keluarga Berencana	BKKBN	205,3
			a. Kesehatan reproduksi remaja					
			b. HIV/AIDS	64	76			
			c. Perencanaan kehidupan berkeluarga	10	30			
		2. Jumlah <i>center of excellent</i> PKBR (per provinsi)	1	15 ^{k)}				

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI 2010- 2014 (Rp Miliar)
				2010	2014			
			3. Jumlah PIK remaja/ mahasiswa yang dibentuk dan dibina	9.373	63.977 ^{K)}			
1.11	Pembinaan ketahanan keluarga ¹⁾	Meningkatnya ketrampilan keluarga dalam pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak, pembinaan remaja, serta peningkatan kualitas hidup lansia	1. Jumlah kebijakan kegiatan pembinaan ketahanan keluarga 2. Persentase kabupaten/kota yang memperoleh dan mendayagunakan prototipe BKB-Kit	4 20	8 ^{K)} 20	Program Kependudukan dan Keluarga Berencana	BKKBN	222,6
1.12	Pelaksanaan kegiatan diseminasi informasi di bidang P4GN ⁴⁾	Meningkatnya kegiatan diseminasi informasi P4GN	Tingkat pemahaman masyarakat tentang bahaya penyalahgunaan narkoba	10%	10%	Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)	BNN	92,7
1.13	Pelaksanaan pengembangan rehabilitasi instansi pemerintah ⁴⁾	Meningkatnya fasilitas rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba yang dikelola instansi pemerintah	Jumlah fasilitas rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba yang dikelola instansi pemerintah	-	1 fasilitas TR	Program P4GN	BNN	279,0
1.14	Pelaksanaan pengembangan rehabilitasi berbasis komponen masyarakat ⁴⁾	Meningkatnya fasilitas rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba yang dikelola komponen masyarakat	Jumlah fasilitas rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba yang dikelola komponen masyarakat	20 fasilitas	20 fasilitas	Program P4GN	BNN	69,8
1.15	Penyediaan layanan pendidikan TK ¹⁾	Tercapainya keluasan dan pemerataan akses TK bermutu dan berkesetaraan gender di semua kabupaten dan kota	APK TK/TKLB	30,60%	36,60%	Program Pendidikan Taman Kanak-kanak dan Pendidikan Dasar	Kementerian Pendidikan Nasional	2.322,4

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI 2010- 2014 (Rp Miliar)
				2010	2014			
1.16	Penjaminan kepastian layanan	Tercapainya keluasan dan pemerataan	1. APK SD/SDLB	103,76%	105,44%	Program	Kementerian	11.633,4
			2. APM SD/SDLB	84,65%	85,36%			
			3. Persentase peserta didik SD putus sekolah	1,50%	0,70%			
1.17	Penyediaan subsidi pendidikan SD/SDLB berkualitas ¹⁾	Tersalurkannya bantuan BOS bagi siswa SD/SDLB	1. Jumlah siswa SD/SDLB sasaran BOS	27.672.820	28.211.000	Program Pendidikan Taman Kanak-kanak dan Pendidikan Dasar	Kementerian Pendidikan Nasional	59.599,1
			2. Jumlah siswa SD/SDLB sasaran beasiswa miskin	2.767.282	3.103.210			
1.18	Penjaminan kepastian pendidikan SMP ¹⁾	Tercapainya keluasan dan pemerataan akses SMP bermutu dan berkesetaraan gender di semua kabupaten dan kota	1. APK SMP/SMPLB	79,98%	88,59%	Program Pendidikan Taman Kanak-kanak dan Pendidikan Dasar	Kementerian Pendidikan Nasional	12.684,6
			2. APM SMP/SMPLB	59,46%	61,07%			
			3. Persentase peserta didik SMP putus sekolah	1,80%	1,00%			
1.19	Penyediaan subsidi pendidikan SMP/SMPLB berkualitas ¹⁾	Tersalurkannya bantuan BOS bagi siswa SMP/SMPLB	1. Jumlah siswa SMP/SMPLB sasaran BOS	9.660.639	10.870.000	Program Pendidikan Taman Kanak-kanak dan Pendidikan Dasar	Kementerian Pendidikan Nasional	31.512,3
			2. Jumlah siswa SMP/SMPLB sasaran beasiswa miskin	966.064	1.195.700			

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI 2010- 2014 (Rp Miliar)
				2010	2014			
1.20	Peningkatan akses dan mutu PK dan PLK ¹⁾	Tercapainya perluasan dan pemerataan akses pendidikan PK dan PLK yang bermutu, berkesetaraan gender, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat, di semua kabupaten dan kota	1. Persentase anak cacat tertampung pada TKLB dan SDLB 2. Persentase peserta didik SDLB putus sekolah 3. Persentase anak kebutuhan khusus yang tertampung pada pendidikan SD PLK 4. Persentase anak luar biasa tertampung pada SMPKH/SMPLB 5. Persentase anak kebutuhan khusus yang tertampung pada pendidikan SMP PLK 6. Persentase anak kebutuhan khusus yang tertampung pada pendidikan TK pendidikan layanan khusus (TK PLK) 7. Jumlah anak berkebutuhan khusus (ABK) yang menerima beasiswa penyelenggaraan pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus	29,60% 1,50% 1,40% 15,70% 2,20% 3,30% 99,754	34,40% 0,70% 3,10% 18,90% 6,60% 7,30% 100,154	Program Pendidikan Taman Kanak-kanak dan Pendidikan Dasar	Kementerian Pendidikan Nasional	697,3
1.21	Penyediaan dan peningkatan pendidikan SMK ¹⁾	Tercapainya perluasan dan pemerataan akses pendidikan SMK bermutu, berkesetaraan gender, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat, di semua kabupaten dan kota	1. APK SMK	30,06%	35,56%	Program Pendidikan Menengah	Kementerian Pendidikan Nasional	9.242,9

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI 2010- 2014 (Rp Miliar)
				2010	2014			
			2. Jumlah siswa SMK penerima BOMM	3.000.000	3.400.000			
			3. Jumlah siswa SMK sasaran beasiswa miskin	305.535	645.298			
1.22	Penyediaan dan peningkatan pendidikan SMA ¹⁾	Tercapainya perluasan dan pemerataan akses pendidikan SMA bermutu, berkesetaraan gender, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat, di semua kabupaten dan kota	1. APK SMA/SMLB nasional	35,59%	40,88%	Program Pendidikan Menengah	Kementerian Pendidikan Nasional	6.530,5
			2. Jumlah siswa SMA penerima BOMM	2.700.000	3.100.000			
			3. Jumlah siswa SMA sasaran beasiswa miskin	378.783	800.000			
1.23	Peningkatan akses dan mutu PK dan PLK ¹⁾	Tercapainya perluasan dan pemerataan akses pendidikan SMLB/SMA Inklusif dan SMA PLK bermutu, berkesetaraan gender, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat, di semua kabupaten dan kota	1. Persentase anak cacat tertampung pada SMAKH/SMLB	7,41	11,00	Program Pendidikan Menengah	Kementerian Pendidikan Nasional	579,3
			2. Persentase anak kebutuhan khusus yang tertampung pada SMA PLK	2,20%	6,90%			
1.24	Penyediaan layanan PAUD nonformal ¹⁾	Terciptanya keluasan dan pemerataan akses PAUD nonformal bermutu dan berkesetaraan gender di kabupaten dan kota	APK PAUD nonformal	11,31%	13,83%	Program Pendidikan Nonformal dan Informal	Kementerian Pendidikan Nasional	5.761,3
1.25	Penyediaan layanan pendidikan kesetaraan ¹⁾	Terciptanya perluasan dan pemerataan akses pendidikan kesetaraan Paket A, Paket B, Paket C dan bagi orang dewasa bermutu, berkesetaraan gender, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat, di semua kabupaten/kota untuk bekerja pada dunia usaha dan dunia industri terkait dan atau usaha mandiri (wirausaha)	1. APK PAKET A	0,56%	0,57%	Program Pendidikan Nonformal dan Informal	Kementerian Pendidikan Nasional	4.147,6
			2. Persentase peserta didik paket A dari putus sekolah SD/MI	1,93%	1,69%			
			3. APK PAKET B	3,75%	3,75%			
			4. Persentase peserta didik paket B dari putus sekolah SMP/MTS	1,93%	1,69%			

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI 2010- 2014 (Rp Miliar)
				2010	2014			
			5. APK PAKET C	1,99%	2,22%			
			6. Persentase peserta didik paket C dari putus sekolah SMA/SMK/MA	1,93%	1,69%			
1.26	Penyelenggaraan kursus dan pelatihan ¹⁾	Terciptanya perluasan dan pemerataan akses kursus dan pendidikan life skill bermutu, berkesetaraan gender, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat, di semua kabupaten/kota	Persentase anak putus sekolah dan lulus sekolah menengah tidak melanjutkan mendapatkan layanan pendidikan keterampilan berbasis kecakapan hidup, bersertifikat, dan bekerja	5%	30%	Program Pendidikan Nonformal dan Informal	Kementerian Pendidikan Nasional	1.847,1
1.27	Penyediaan layanan pendidikan masyarakat ¹⁾	Meningkatnya tingkat literasi yang berkesetaraan gender di kabupaten dan kota	Persentase kab/kota yang telah menyelenggarakan <i>parenting education</i>	0,00%	50,00%	Program Pendidikan Nonformal dan Informal	Kementerian Pendidikan Nasional	2.182,2
1.28	Peningkatan Akses dan Mutu Madrasah Ibtidaiyah ¹⁾	1. Meningkatnya APM MI	APM MI	10,55%	10,64%	Program Pendidikan Islam	Kementerian Agama	12.651,7
		2. Meningkatnya APK MI	APK MI	13,44%	13,66%			
1.29	Peningkatan Akses dan Mutu Madrasah Tsanawiyah ¹⁾	1. Meningkatnya APM MTs	APM MTs	14,54%	14,93%	Program Pendidikan Islam	Kementerian Agama	
		2. Meningkatnya APK MTs	APK MTs	19,32%	21,41%			
1.30	Penyediaan Subsidi Pendidikan Madrasah Bermutu ¹⁾	1. Tersedianya anggaran BOS MI dan MTs	Siswa MI, MTs penerima BOS (Siswa)	6.184.150	6.595.965	Program Pendidikan Islam	Kementerian Agama	23.780,8
		2. Tersedianya Beasiswa Miskin MI	Siswa Miskin MI Penerima Beasiswa (Siswa)	640.000	640.000			
		3. Tersedianya Beasiswa Miskin MTs	Siswa Miskin MTs Penerima Beasiswa (Siswa)	540.000	540.000			
		4. Tersedianya Beasiswa Miskin MA	Siswa Miskin MA Penerima Beasiswa (Siswa)	320.000	320.000			

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI 2010- 2014 (Rp Miliar)
				2010	2014			
1.31	Peningkatan Akses dan Mutu Madrasah Aliyah ¹⁾	Meningkatnya APK MA	APK MA	7,35%	8,56%	Program Pendidikan Islam	Kementerian Agama	6.341,4
1.32	Pembinaan dan Pengembangan Budaya Politik ³⁾	Terlaksananya penyusunan kebijakan, dukungan dan fasilitasi pengembangan budaya politik	Jumlah materi/modul tentang pendidikan politik bagi calon pemilih pemula	3 Modul tentang Pendidikan Politik bagi calon pemilih Pemula	15 Modul ^{K)} tentang Pendidikan Politik bagi calon pemilih Pemula	Program Pembinaan Kesatuan Bangsa dan Politik	Kementerian Dalam Negeri	98,1
1.33	Pedoman/petunjuk teknis dan bimbingan teknis/supervisi/publikasi/sosialisasi penyelenggaraan pemilu dan pendidikan pemilih ³⁾	Terselenggaranya bimbingan teknis/supervisi/publikasi/sosialisasi penyelenggaraan pemilu dan pendidikan pemilih	Jumlah modul pendidikan pemilih untuk kelompok perempuan, miskin, cacat, pemilih pemula, lansia	5	25 ^{K)}	Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi Dan Perbaikan Proses Politik	Komisi Pemilihan Umum	247,5
1.34	Bantuan Tunai Bersyarat ¹⁾	Terlaksananya pemberian Bantuan Tunai Bersyarat bagi RTSM (PKH)	Jumlah RTSM yang mendapatkan Bantuan Tunai Bersyarat PKH (RTSM)	816.000	1.170.000	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Kementerian Sosial	8.985,0
2	Peningkatan perlindungan anak dari berbagai tindak kekerasan dan diskriminasi	meningkatnya akses dan kualitas layanan perlindungan anak	Persentase cakupan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan	-	100%			2.752,6
2.1	Penyusunan dan harmonisasi kebijakan perlindungan perempuan dari tindak kekerasan ¹⁾	Meningkatnya jumlah kebijakan perlindungan perempuan dari tindak kekerasan	Persentase cakupan anak korban kekerasan yang mendapat penanganan pengaduan	-	100%	Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Kementerian PP dan PA	50,1

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI 2010- 2014 (Rp Miliar)
				2010	2014			
2.2	Penanggulangan Krisis Kesehatan ¹⁾	Meningkatnya penanggulangan krisis secara cepat	Jumlah kab/kota yang mempunyai kemampuan tanggap darurat dalam penanganan bencana	105	300	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Kementerian Kesehatan	651,0
2.3	Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri di Kawasan Asia Timur dan Pasifik ³⁾	Terlaksananya peran Indonesia dalam kerjasama di bidang politik, keamanan, ekonomi, dan sosial budaya dengan negara-negara di kawasan Asia Timur dan Pasifik	Tingkat penanganan isu <i>illegal migrant</i> dan <i>human trafficking</i> serta isu-isu lainnya	25%	25%	Program Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri serta Optimalisasi Diplomasi di Kawasan Asia Pasifik dan Afrika	Kementerian Luar Negeri	27,8
2.4	Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri di Kawasan Asia Selatan dan Tengah ³⁾	Terlaksananya peran Indonesia dalam kerjasama di bidang politik, keamanan, ekonomi, dan sosial budaya dengan negara-negara di kawasan Asia Selatan dan Tengah	Tingkat penanganan isu <i>illegal migrant</i> dan <i>human trafficking</i> serta isu-isu lainnya	25%	25%	Program Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri serta Optimalisasi Diplomasi di Kawasan Asia Pasifik dan Afrika	Kementerian Luar Negeri	18,8

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI 2010- 2014 (Rp Miliar)
				2010	2014			
2.5	Peningkatan perlindungan pekerja perempuan dan penghapusan pekerja anak ²⁾	1. Memfasilitasi pekerja anak untuk kembali ke dunia pendidikan atau memperoleh pelatihan keterampilan 2. Berkurangnya jumlah anak yang bekerja pada bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak (BPTA)	1. Jumlah pekerja anak yang ditarik dari BPTA 2. Persentase pekerja anak yang ditarik dari BPTA yang dikembalikan ke dunia pendidikan dan/atau memperoleh pelatihan keterampilan	3000	28.200 ^{KO}	Program Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembangan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan	Kemenakertrans	212,0
		3. Meningkatnya perlindungan kepada pekerja perempuan	3. Persentase perusahaan yang memenuhi norma kerja perempuan dan anak 4. Tersedianya kebijakan dalam upaya perlindungan pekerja perempuan dan anak	10%	40%			58,8
			5. Jumlah pengawas ketenagakerjaan dalam pengawasan norma kerja perempuan dan anak yang ditingkatkan kapasitasnya	120	990 ^{KO}			

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI 2010- 2014 (Rp Miliar)
				2010	2014			
2.6	Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial Anak ¹⁾	Terlaksananya pelayanan, perlindungan dan rehabilitasi sosial bagi anak dan balita telantar, anak jalanan, anak berhadapan dengan hukum, dan anak yang membutuhkan perlindungan khusus.	Jumlah anak telantar, anak jalanan, anak cacat dan anak nakal yang berhasil dilayani, dilindungi dan direhabilitasi baik di dalam maupun di luar panti (jiwa)	159.500	263.000	Program Rehabilitasi Sosial	Kementerian Sosial	1.717,1
2.7	Pembinaan Penyelenggaraan Kegiatan di bidang Kesehatan dan Perawatan warga binaan pemasyarakatan ⁵⁾	Penyelenggaraan kegiatan di bidang kesehatan dan perawatan yang berkualitas	1. Persentase tahanan narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang memperoleh perawatan dan pelayanan kesehatan sesuai standar kesehatan 2. Persentase bayi, ibu hamil, ibu menyusui dan kelompok resiko tinggi yang memperoleh perlindungan secara tepat waktu dan akuntabel	30%	50%	Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemasyarakatan	Kementerian Hukum dan HAM	9,8
2.8	Pembinaan Penyelenggaraan kegiatan di bidang Bimbingan kemasyarakatan dan Anak ⁵⁾	Penyelenggaraan kegiatan bimbingan kemasyarakatan dan anak yang berkualitas	1. Persentasi anak didik pemasyarakatan yang memperoleh pendidikan dan reintegrasi secara tepat waktu dan akuntabel	62%	82%	Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemasyarakatan	Departemen Hukum dan HAM	7,1

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI 2010- 2014 (Rp Miliar)
				2010	2014			
			2. Persentase anak didik masyarakatan yang memperoleh pendampingan dan pembimbingan secara tepat dan akuntabel					
			3. Persentase anak didik masyarakatan dan klien masyarakatan yang mendapatkan litmas secara tepat dan akuntabel					
3	Peningkatan kelembagaan perlindungan anak	1. Meningkatnya penguatan dasar hukum dan kebijakan yang mendukung pemenuhan hak-hak anak 2. Menguatnya manajemen dan sistem kelembagaan perlindungan anak	Persentase jumlah kebijakan dan peraturan perundang-undangan terkait perlindungan anak yang diharmonisasikan	100	100			529,9

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI 2010- 2014 (Rp Miliar)
				2010	2014			
3.1	Sistem Informasi Manajemen ⁵⁾	Tersedianya basis data yang dapat menyajikan informasi data perkara secara akurat, cepat, dan lengkap dalam rangka mewujudkan penanganan perkara secara cepat dan akuntabel serta dapat diakses oleh masyarakat	Jumlah kegiatan pendataan perkara yang disajikan berdasarkan jenis penanganan perkara termasuk jenis perkara KDRT, perkara anak, dan perkara lainnya	1 keg	1 keg	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Kejaksaan Agung	151,9
3.2	Kegiatan Kerjasama HAM ⁵⁾	Peningkatan kerjasama dalam dan luar negeri dlm rangka pemajuan HAM dan harmonisasi rancangan peraturan perUUan dalam perspektif HAM serta NA instrument HAM internasional	Jumlah harmonisasi rancangan peraturan perUUan dalam perspektif HAM	100%	100%	Program Perlindungan dan Pemenuhan HAM	Kementerian Hukum dan HAM	9,0
3.3	Kegiatan Perancangan Peraturan Perundang- undangan ⁵⁾	Peningkatan kualitas RUU dan perat perundang-undangan di bawah UU di DPR serta tenaga fungsional Perancang PerUUan	Jumlah Peraturan Perundang-undangan di bidang mekanisme Perlindungan Saksi dan Pelapor	20%	100%	Program Pembentukan Hukum	Kementerian Hukum dan HAM	75,0

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI 2010- 2014 (Rp Miliar)	
				2010	2014				
3.4	Kegiatan Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan ⁵⁾	Meningkatkan keharmonisan rancangan peraturan perundang-undangan tingkat pusat bidang politik, hukum, keamanan, keuangan, perbankan, industri, perdagangan, sumber daya alam, riset, teknologi, kesejahteraan rakyat yang harmonis	1. Persentase rancangan peraturan perundang-undangan tingkat pusat bidang kesejahteraan rakyat yang harmonis 2. Jumlah Peraturan Perundang-undangan di bidang mekanisme Perlindungan Saksi dan Pelapor	20%	100%	Program Pembentukan Hukum	Kementerian Hukum dan HAM	38,5	
3.5	Penyusunan dan harmonisasi kebijakan pemenuhan hak pendidikan anak ¹⁾	Meningkatnya jumlah kebijakan pemenuhan hak pendidikan anak	1. Jumlah kebijakan pemenuhan hak pendidikan anak	1	3 ^{K)}	Program Perlindungan Anak	Kementerian PP dan PA	27,5	
			2. Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi dalam pemenuhan hak pendidikan anak	K/L	1				1
				prov	5				10
			3. Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi dalam penyusunan data pelaksanaan kebijakan pendidikan anak	K/L	1				1
prov	1	33 ^{K)}							

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI 2010- 2014 (Rp Miliar)	
				2010	2014				
3.6	Penyusunan dan harmonisasi kebijakan pemenuhan hak kesehatan anak ¹⁾	Meningkatnya jumlah kebijakan pemenuhan hak kesehatan anak	1. Jumlah kebijakan pemenuhan hak kesehatan anak		2	2 ^{KJ}	Program Perlindungan Anak	Kementerian PP dan PA	19,1
			2. Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi dalam pemenuhan hak kesehatan anak	K/L	1	2			
				prov	4	23 ^{KJ}			
			3. Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi dalam penyusunan data kesehatan anak	K/L	1	1			
				prov	4	19 ^{KJ}			
			3.7	Penyusunan dan harmonisasi kebijakan pemenuhan hak partisipasi anak ¹⁾	Meningkatnya jumlah kebijakan pemenuhan hak partisipasi anak	1. Jumlah kebijakan pemenuhan hak partisipasi anak			
2. Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi dalam pemenuhan hak partisipasi anak	K/L	-				1			
	prov	2				25 ^{KJ}			
3. Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi dalam penyusunan data pemenuhan hak partisipasi anak	K/L	-				3 ^{KJ}			
	prov	1				17 ^{KJ}			

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI 2010- 2014 (Rp Miliar)	
				2010	2014				
3.8	Penyusunan dan harmonisasi kebijakan lingkungan yang layak untuk anak ¹⁾	Meningkatnya jumlah kebijakan lingkungan yang layak untuk anak	1. Jumlah kebijakan lingkungan yang layak untuk anak		2	2 ^{KJ}	Program Perlindungan Anak	Kementerian PP dan PA	12,8
			2. Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi tentang lingkungan yang layak untuk anak	K/L	1	5 ^{KJ}			
				prov	4	29 ^{KJ}			
			3. Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi dalam penyusunan data lingkungan yang layak untuk anak	K/L	1	5 ^{KJ}			
				prov	1	12 ^{KJ}			
3.9	Penyusunan dan harmonisasi kebijakan pengembangan kabupaten/kota layak anak (KLA) ¹⁾	Meningkatnya jumlah kebijakan pengembangan kabupaten/kota layak anak (KLA)	1. Jumlah kebijakan pengembangan kabupaten/kota layak anak (KLA)		2	2 ^{KJ}	Program Perlindungan Anak	Kementerian PP dan PA	49,0
			2. Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi tentang kota layak anak	K/L	1	10			
				prov	10	10			

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI 2010- 2014 (Rp Miliar)
				2010	2014			
			3. Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi dalam penyusunan data pengembangan kabupaten/kota layak anak (KLA)	K/L	1	2		
				prov	7	25 ^{ko}		
3.10	Penyusunan dan harmonisasi kebijakan penghapusan kekerasan pada anak ¹⁾	Meningkatnya jumlah kebijakan penghapusan kekerasan pada anak	1. Jumlah kebijakan penghapusan kekerasan pada anak		1	4 ^{ko}	Program Perlindungan Anak	Kementerian PP dan PA
			2. Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi tentang penghapusan kekerasan pada anak	K/L	1	6 ^{ko}		
				prov	5	26 ^{ko}		
			3. Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi dalam penyusunan data anak korban kekerasan	K/L	1	1		
				prov	2	13 ^{ko}		
								11,8

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI 2010- 2014 (Rp Miliar)	
				2010	2014				
3.11	Penyusunan dan harmonisasi kebijakan tentang masalah sosial anak ¹⁾	Meningkatnya jumlah perlindungan anak dari masalah sosial	1. Jumlah kebijakan perlindungan anak dari masalah sosial		2	4 ^{K)}	Program Perlindungan Anak	Kementerian PP dan PA	20,6
			2. Jumlah K/L dan pemma yang difasilitasi tentang perlindungan anak dari masalah sosial	K/L	2	5			
				prov	5	8			
			3. Jumlah K/L dan pemma yang difasilitasi dalam penyusunan data perlindungan anak dari masalah sosial	K/L	1	1			
prov	2	17 ^{K)}							
3.12	Penyusunan dan harmonisasi kebijakan untuk penanganan anak yang berhadapan dengan hukum ¹⁾	Meningkatnya jumlah kebijakan untuk penanganan anak yang berhadapan dengan hukum	1. Jumlah kebijakan penanganan anak yang berhadapan dengan hukum		3	7 ^{K)}	Program Perlindungan Anak	Kementerian PP dan PA	30,5
			2. RUU Peradilan Pidana Anak		1 Naskah Akademik	1 RUU			

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI 2010- 2014 (Rp Miliar)	
				2010	2014				
			3. Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi tentang penanganan anak yang berhadapan dengan hukum	K/L	2	6			
				prov	8	7			
			4. Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi dalam penyusunan data anak yang berhadapan dengan hukum	K/L	1	3			
				prov	3	15 ^{K)}			
3.13	Penyusunan dan harmonisasi kebijakan perlindungan bagi anak yang berkebutuhan khusus ¹⁾	Meningkatnya jumlah kebijakan perlindungan bagi anak yang berkebutuhan khusus	1. Jumlah kebijakan perlindungan bagi anak yang berkebutuhan khusus		2	3 ^{K)}	Program Perlindungan Anak	Kementerian PP dan PA	17,2
			2. Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi tentang perlindungan anak yang berkebutuhan khusus	K/L	1	8 ^{K)}			
				prov	5	11			
			3. Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi dalam penyusunan data anak yang berkebutuhan khusus	K/L	-	5 ^{K)}			
				prov	-	15 ^{K)}			

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI 2010- 2014 (Rp Miliar)	
				2010	2014				
3.14	Penyusunan dan harmonisasi kebijakan hak sipil anak ¹⁾	Meningkatnya jumlah kebijakan hak sipil anak	1. Jumlah kebijakan hak sipil anak		1	3 ^{K)}	Program Perlindungan Anak	Kementerian PP dan PA	11,2
			2. Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi tentang hak sipil anak	K/L	1	5 ^{K)}			
				prov	10	29 ^{K)}			
			3. Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi dalam penyusunan data hak sipil anak	K/L	1	5 ^{K)}			
prov	3	10 ^{K)}							
3.15	Pengawasan pelaksanaan perlindungan anak (KPAI) ¹⁾	Meningkatnya jumlah pengawasan pelaksanaan perlindungan anak	1. Jumlah pengawasan pelaksanaan perlindungan anak di prov/kab/kota (prov)		33	33	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis	KPAI	43,0
			2. Jumlah rekomendasi hasil pelaksanaan perlindungan anak (lap)		1	5 ^{K)}			
TOTAL								221.173,5	

Keterangan:

^{K)} Angka kumulatif 5 tahun (2010-2014)

¹⁾ kegiatan ini tercantum pada Bab II (Bidang Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama)

²⁾ kegiatan ini tercantum pada Bab III (Bidang Ekonomi)

³⁾ kegiatan ini tercantum pada Bab VI (Bidang Politik)

⁴⁾ kegiatan ini tercantum pada Bab VII (Bidang Pertahanan dan Keamanan)

⁵⁾ kegiatan ini tercantum pada Bab VIII (Bidang Hukum dan Aparatur)



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2010
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH NASIONAL
(RPJMN)
TAHUN 2010--2014**

**BUKU II
MEMPERKUAT SINERGI ANTARBIDANG PEMBANGUNAN**

**BAB II
SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA**

**Diperbanyak Oleh:
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS)
2010**



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
BAB II PEMBANGUNAN SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN	
BERAGAMA	II.2-1
2.1 Kondisi Umum	II.2-2
2.2 Permasalahan, Tantangan dan Sasaran Pembangunan.....	II.2-10
2.2.1 Permasalahan dan Tantangan	II.2-13
2.2.1.1 Jumlah Penduduk yang Besar	II.2-13
2.2.1.2 Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan yang Rendah	II.2-18
2.2.1.3 Akses, Kualitas dan Relevansi Pendidikan yang Rendah	II.2-30
2.2.1.4 Partisipasi Pemuda, Budaya dan Prestasi Olahraga yang Rendah	II.2-47
2.2.1.5 Kualitas Kehidupan Beragama yang Belum Optimal.....	II.2-48
2.2.1.6 Jati Diri Bangsa yang Belum Mantap dan Pelestarian Budaya yang Belum Optimal	II.2-53
2.2.1.7 Akses dan Kualitas Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang Terbatas.....	II.2-55
2.2.1.8 Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak yang Belum Optimal.....	II.2-56
2.2.2 Sasaran Pembangunan Tahun 2010-2014.....	II.2-57
2.3 Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan	II.2-63



BAB II

PEMBANGUNAN SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA

Pembangunan bidang sosial budaya dan kehidupan beragama yang mencakup bidang-bidang kesehatan dan gizi, pendidikan, kependudukan dan keluarga berencana, perpustakaan nasional, pemuda dan olahraga, agama, kebudayaan, pelayanan kesejahteraan sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak merupakan rangkaian upaya kunci peningkatan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 yang mengamanatkan bahwa pembangunan bidang sosial budaya dan kehidupan beragama diarahkan pada pencapaian sasaran pokok, yaitu terwujudnya masyarakat Indonesia yang berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab, serta bangsa yang berdaya saing untuk mencapai masyarakat yang lebih makmur dan sejahtera yang, antara lain, ditunjukkan oleh meningkatnya kualitas sumber daya manusia, termasuk peran perempuan dalam pembangunan. Pencapaian sasaran pokok tersebut dilakukan melalui pembangunan manusia seutuhnya baik laki-laki maupun perempuan yang meliputi manusia sebagai insan dan sumber daya pembangunan.

Pembangunan manusia sebagai insan menekankan pada manusia yang berharkat, bermartabat, bermoral dan memiliki jati diri serta karakter tangguh baik dalam sikap mental, daya pikir maupun daya ciptanya. Selain itu pembangunan manusia sebagai insan menekankan pada pendidikan yang tinggi, sehat jasmani dan rohani serta bergizi. Adapun pembangunan manusia sebagai sumberdaya pembangunan yaitu sebagai pelaku pembangunan menekankan pada manusia yang memiliki etos kerja produktif, keterampilan, kreatif dan inovatif, disiplin dan profesional, berorientasi pada ilmu pengetahuan dan teknologi serta berwawasan lingkungan dan kemampuan manajemen.

Pembangunan manusia sebagai insan dan sumberdaya pembangunan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, dilakukan pada seluruh siklus hidup manusia yaitu sejak dalam kandungan sampai usia lanjut. Upaya tersebut dilandasi oleh pertimbangan bahwa kualitas manusia yang baik ditentukan oleh pertumbuhan dan perkembangannya sejak dalam kandungan. Di samping itu, pembangunan manusia juga dilaksanakan dengan memperhatikan kebutuhan yang berbeda-beda dari tiap tahap kehidupan manusia, termasuk pelayanan bagi penyandang cacat, anak terlantar dan lanjut usia terlantar, korban bencana alam dan bencana sosial, serta fakir miskin dan komunitas adat terpencil.

Kemampuan bangsa untuk berdaya saing tinggi merupakan kunci bagi tercapainya kemajuan dan kemakmuran bangsa. Daya saing bangsa yang tinggi akan menjadikan Indonesia siap menghadapi tantangan globalisasi dan mampu

memanfaatkan peluang yang ada. Untuk memperkuat daya saing bangsa, pembangunan nasional diarahkan untuk mengedepankan pembangunan sumber daya manusia (SDM), baik laki-laki maupun perempuan, yang berkualitas. Perkuatan daya saing bangsa mensyaratkan negara yang aman, damai dan demokratis yang masyarakatnya hidup rukun dan harmonis yang didukung oleh pemerataan pembangunan di segala bidang. Di samping itu, jumlah dan persebaran penduduk juga harus dijaga agar terjadi keseimbangan dengan daya dukung lingkungan.

2.1 Kondisi Umum

Selama periode 2004–2009, berbagai upaya pembangunan sosial budaya dan kehidupan beragama telah meningkatkan kualitas SDM Indonesia yang, antara lain, ditandai dengan membaiknya derajat kesehatan dan taraf pendidikan penduduk yang didukung oleh meningkatnya ketersediaan dan kualitas pelayanan sosial dasar bagi seluruh rakyat Indonesia. Secara komposit, peningkatan kualitas SDM ditandai oleh makin membaiknya indeks pembangunan manusia (IPM) atau *human development index* (HDI) yang merupakan indikator komposit status kesehatan yang dilihat dari angka harapan hidup saat lahir; taraf pendidikan yang diukur dengan angka melek huruf penduduk dewasa dan gabungan angka partisipasi kasar jenjang pendidikan dasar, menengah, tinggi, serta taraf perekonomian penduduk yang diukur dengan pendapatan domestik bruto (PDB) per kapita dengan paritas daya beli (*purchasing power parity*).

Human development report (HDR) tahun 2009 mengungkapkan IPM Indonesia meningkat dari 0,711 pada tahun 2004 menjadi 0,734 pada tahun 2007, seperti ditunjukkan dalam Tabel 2.1. Peningkatan IPM ini tidak disertai dengan peningkatan peringkat Indonesia, yang pada tahun 2009 peringkatnya masih tetap rendah, yaitu 111 dari 182 negara. Demikian juga dengan *gender-related development index/GDI* atau indeks pembangunan gender (IPG) Indonesia, yang dihitung berdasarkan variabel yang sama dengan IPM menurut jenis kelamin, mengalami peningkatan dari 0,704 pada tahun 2004 menjadi 0,726 pada tahun 2007. Namun, bila dilihat peringkatnya Indonesia masih berada pada peringkat ke-93 dari 155 negara.

TABEL 2.1
TREN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM) TAHUN 2001–2007

Indeks Pembangunan Manusia		Tahun						
		2000	2001	2002	2003	2004	2005	2007
IPM		0,684	0,682	0,692	0,697	0,711	0,728	0,734
Peringkat	ke	110	112	111	110	108	107	111
	dari	173 negara	175 negara	177 negara	177 negara	177 negara	177 negara	182 negara

Sumber: UNDP, Human Development Report (berbagai tahun)

Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk. Laju pertumbuhan penduduk Indonesia menurun dari 1,49 persen (Sensus Penduduk/SP 2000) menjadi 1,30 persen (Survei Penduduk Antar Sensus/Supas 2005), dan diperkirakan menjadi 1,22 persen pada tahun 2009. Walaupun demikian, jumlah penduduk masih terus meningkat dari 205,8 juta pada tahun 2000 menjadi 218,9 juta pada tahun 2005, dan diperkirakan menjadi 231,4 juta pada tahun 2009 (Proyeksi Penduduk Indonesia 2005–2025, yang dihitung berdasarkan parameter hasil Supas 2005).

Pembangunan kependudukan di Indonesia selama ini telah mempercepat terjadinya transisi demografi yang ditandai dengan peningkatan usia harapan hidup dan penurunan angka kelahiran serta kematian. Hal ini mengakibatkan turunnya angka ketergantungan, disebut bonus demografi, yaitu menurunnya proporsi jumlah penduduk usia di bawah 15 tahun dan 65 tahun ke atas terhadap jumlah penduduk usia kerja (15–64 tahun). Rasio ketergantungan diperkirakan turun dari 50,1 persen pada tahun 2005 menjadi 45,6 persen pada tahun 2025. Rasio ketergantungan terendah yaitu sebesar 45,3 persen, diperkirakan terjadi pada tahun 2022 dan 2023. Terjadinya penurunan angka ketergantungan tersebut merupakan jendela peluang (*window of opportunity*) untuk memicu pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Beberapa syarat yang harus dipenuhi agar jendela peluang dapat bermanfaat adalah: (1) meningkatnya kualitas sumber daya manusia sehingga mempunyai kompetensi dan daya saing tinggi; (2) tersedianya kesempatan kerja produktif, agar penduduk usia kerja yang jumlahnya besar dapat bekerja untuk meningkatkan tabungan rumah tangga; (3) diinvestasikannya tabungan rumah tangga untuk menciptakan kesempatan kerja produktif; dan (4) meningkatnya pemberdayaan perempuan untuk memasuki pasar kerja. Di Indonesia, jendela peluang tersebut diperkirakan hanya akan terjadi sekali sepanjang sejarah, dengan periode kejadian yang sangat pendek yaitu pada tahun 2020–2025.

Pembangunan kependudukan yang didukung oleh program keluarga berencana telah berhasil menurunkan angka kelahiran total (*total fertility rate/TFR*) dari 2,4 (SDKI

2002–2003, TFR setelah dikoreksi) menjadi 2,3 anak per perempuan usia reproduksi (SDKI 2007, TFR setelah dikoreksi). Penurunan TFR tersebut, antara lain, disebabkan oleh meningkatnya median usia kawin pertama perempuan dari sekitar 19,2 tahun (SDKI 2002–2003) menjadi 19,8 tahun (SDKI 2007). Keberhasilan menurunkan angka kelahiran sejak 1971 telah mampu mencegah lebih dari 100 juta kehamilan atau kelahiran. Pelaksanaan program keluarga berencana diperkuat dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sebagai landasan untuk pelaksanaan pembangunan kependudukan dan keluarga berencana.

Selain itu, keberhasilan pembangunan kependudukan didukung pula oleh penguatan manajemen data dan informasi kependudukan. Sumber data utama kependudukan diperoleh melalui SP, Supas, dan survei dengan tujuan khusus seperti SDKI, survei sosial ekonomi nasional (Susenas), survei angkatan kerja nasional (Sakernas), dan registrasi penduduk. Selama periode tahun 2004–2009 telah dilakukan Supas 2005, SDKI 2007, Susenas 2004–2008, dan Sakernas 2004–2009.

Sementara itu, untuk mendukung reformasi pelayanan registrasi penduduk dan pencatatan sipil, sampai dengan Agustus 2009 telah dibangun sistem informasi administrasi kependudukan (SIAK) di 495 kabupaten/kota. Pengembangan SIAK merupakan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang mengamanatkan pemerintah untuk memberikan nomor induk kependudukan (NIK) kepada setiap penduduk dan menggunakan NIK sebagai dasar dalam menerbitkan dokumen kependudukan. Penerapan undang-undang tersebut dijabarkan melalui Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional.

Status Kesehatan dan Gizi Masyarakat. Pencapaian status kesehatan dan gizi masyarakat merupakan kinerja sistem kesehatan yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat dan daerah serta berbagai komponen masyarakat. Kinerja pembangunan kesehatan dicapai melalui pendekatan enam sub-sistem dalam sistem kesehatan nasional (SKN), yaitu sub-sistem: (1) upaya kesehatan; (2) pembiayaan kesehatan; (3) sumberdaya manusia kesehatan; (4) sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan; (5) manajemen dan informasi kesehatan; dan (6) pemberdayaan masyarakat. Keenam sub-sistem tersebut saling terkait dengan berbagai sistem lain di luar SKN antara lain sistem pendidikan, sistem ekonomi, dan sistem budaya.

Status kesehatan dan gizi masyarakat Indonesia yang diukur dari umur harapan hidup (UHH), angka kematian ibu (AKI), angka kematian bayi (AKB), dan prevalensi kekurangan gizi pada balita terus menunjukkan perbaikan, seperti tampak pada Tabel 2.2.

TABEL 2.2
STATUS KESEHATAN DAN GIZI MASYARAKAT TAHUN 2004–2009

Indikator Status Kesehatan Masyarakat	Status Awal	Target 2009	Pencapaian Target
Umur harapan hidup (tahun)	66,2 ^{a)}	70,6	70,7 ^{f)}
Angka kematian ibu (per 100 ribu kelahiran hidup)	307 ^{b)}	226	228 ^{d)}
Prevalensi kekurangan gizi (persen)	28,0 ^{c)}	20	18,4 ^{e)}
Angka kematian bayi (per 1000 kelahiran hidup)	35 ^{b)}	26	34 ^{d)}

Sumber: ^{a)} Inkesra, 2004; ^{b)} SDKI, 2002–2003; ^{c)} Susenas, 2005; ^{d)} SDKI, 2007; ^{e)} Riskesdas, 2007; dan ^{f)} Proyeksi BPS, 2008

Kinerja upaya kesehatan terus menunjukkan perbaikan, dapat diamati dari berbagai indikator upaya kesehatan, seperti kesehatan ibu dan anak, imunisasi, perbaikan gizi, kesehatan lingkungan, dan pengendalian penyakit. Alokasi anggaran kesehatan pemerintah dan pemerintah daerah pada RPJMN 2004–2009 mengalami peningkatan cukup signifikan. Anggaran pemerintah pusat meningkat 4 kali lipat selama 5 tahun terakhir. Begitu pula halnya dengan anggaran kesehatan yang berasal dari pemerintah daerah terus meningkat. Sejalan dengan meningkatnya anggaran kesehatan, cakupan pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin juga mengalami peningkatan secara signifikan, yaitu dari 36,4 juta jiwa pada tahun 2005 menjadi 76,4 juta jiwa pada tahun 2009. Sementara itu, sumberdaya manusia kesehatan terus membaik dalam jumlah, kualitas, dan penyebaran untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan di seluruh wilayah terutama pada daerah terpencil, tertinggal, perbatasan, dan kepulauan. Ketersediaan, keterjangkauan, mutu, serta penggunaan obat dan perbekalan kesehatan semakin membaik

Selanjutnya, manajemen kesehatan yang mencakup; perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan pertanggungjawaban pembangunan kesehatan terus dikembangkan. Upaya untuk menyusun perumusan kebijakan kesehatan yang berbasis bukti, survailans secara menyeluruh, dan regulasi bidang kesehatan baik jenis, jumlah maupun efektivitasnya juga terus ditingkatkan. Sementara itu, pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan juga terus dikembangkan melalui upaya kesehatan berbasis masyarakat (UKBM) dengan pelibatan lintas sektor, penerapan peraturan perundangan yang terkait dengan promosi kesehatan serta perpaduan dengan kegiatan

yang berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat (*income generating*).

Taraf Pendidikan Penduduk. Pembangunan pendidikan menempati peran sangat strategis dalam keseluruhan upaya membangun kehidupan berbangsa dan bernegara sebagaimana dicita-citakan oleh para pendiri bangsa dan dirumuskan dalam Pasal 31 ayat (1) UUD 1945 yang menegaskan bahwa setiap warga negara berhak atas pendidikan. Selain itu, berbagai kesepakatan internasional khususnya *millennium development goals* (MDGs), yang menetapkan bahwa sebelum tahun 2015 semua anak baik laki-laki maupun perempuan menyelesaikan pendidikan dasar, dan Deklarasi UNESCO tentang *Education for All* (EFA) telah pula menjadi dasar pelaksanaan pembangunan pendidikan di Indonesia.

Pendidikan juga merupakan instrumen pembangunan ekonomi dan sosial, termasuk di antaranya untuk mendukung upaya mengentaskan kemiskinan, meningkatkan keadilan dan kesetaraan gender, serta memperkuat nilai-nilai budaya. Terkait upaya mendukung pembangunan ekonomi, pendidikan yang relevan dan berkualitas tinggi memainkan peran penting untuk meningkatkan daya saing regional. Dalam hal ini, pendidikan dituntut untuk mampu melengkapi lulusannya agar memiliki keterampilan teknis (*hard skill*), dan juga kemampuan untuk berpikir analitis, berkomunikasi, serta bekerjasama dalam tim yang secara keseluruhan sering dirangkul sebagai keterampilan lunak (*soft skill*). Di samping itu, pendidikan diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap jati diri bangsa melalui pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia.

Dalam konteks lebih luas, pendidikan merupakan dasar utama bagi keseluruhan upaya implementasi prioritas tertinggi kebijakan pembangunan sumberdaya manusia dalam kerangka pembangunan nasional yang komprehensif, misalnya: pendidikan dasar dikaitkan dengan upaya penanggulangan kemiskinan; pendidikan menengah diarahkan untuk meningkatkan potensi kekerjaan (*employment*); dan pendidikan tinggi diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kepemimpinan dalam masyarakat dan bangsa. Oleh sebab itu, pembangunan dan penyelenggaraan layanan pendidikan nasional perlu dilakukan dengan pendekatan komprehensif, holistik, serta mengedepankan cara pandang anak didik sebagai manusia utuh.

Pembangunan pendidikan telah berhasil meningkatkan taraf pendidikan masyarakat Indonesia yang ditandai dengan meningkatnya rata-rata lama sekolah dari 7,1 tahun pada tahun 2003 menjadi sebesar 7,50 tahun pada tahun 2008, menurunnya proporsi buta aksara penduduk usia 15 tahun ke atas dari 10,21 persen pada tahun 2004 menjadi 5,97 persen pada tahun 2008, serta meningkatnya angka partisipasi kasar (APK) dan angka partisipasi murni (APM) pada semua jenjang pendidikan. APM SD/MI/ sederajat pada tahun 2004 sebesar 94,12 persen meningkat menjadi 95,14 persen pada tahun 2008, dan APK SMP/MTs/ sederajat pada tahun 2004 adalah sebesar 81,22 persen meningkat menjadi 96,18 persen pada tahun 2008. Sementara itu, APK SMA/SMK/MA/ sederajat dan APK pendidikan tinggi pada tahun 2004 masing-masing



mencapai sebesar 49,01 persen dan 14,62 persen meningkat menjadi 64,28 persen dan 17,75 persen pada tahun 2008.

Peningkatan taraf pendidikan tersebut diikuti dengan meningkatnya kualitas, relevansi, dan daya saing pendidikan. Peningkatan kualitas ditandai, antara lain, dengan rata-rata nilai ujian nasional (UN) dan pencapaian berbagai prestasi dalam berbagai kompetisi nasional dan internasional. Peningkatan kualitas akan berkontribusi pada membaiknya daya saing bangsa. Menurut *the Global Competitive Report 2009–2010* yang diterbitkan oleh *World Economic Forum (WEF)*, daya saing Indonesia di tingkat dunia mengalami peningkatan dari urutan ke 69 pada tahun 2005 menjadi urutan ke 54 pada tahun 2009. Peningkatan daya saing tersebut mengacu pada tiga indikator utama, yaitu: (1) persyaratan dasar yang mencakup kesehatan dan pendidikan dasar; (2) penguat efisiensi yang mencakup pendidikan tinggi dan pelatihan; (3) inovasi dan faktor keunggulan yang ditunjukkan oleh kualitas lembaga penelitian, kerja sama penelitian dan industri, serta ketersediaan ilmuwan dan ahli teknik. Dalam lingkungan regional, Indonesia mampu mempertahankan kualitas manusia yang ditunjukkan oleh indeks pembangunan manusia Indonesia berada pada urutan ke-6 dari 9 negara ASEAN (*Human Development Report, 2009*).

Dalam rangka mendukung peningkatan kualitas pendidikan, kualifikasi guru dan dosen terus ditingkatkan, antara lain, melalui pelaksanaan program kualifikasi dan sertifikasi guru dan dosen sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen. Dalam kurun waktu 2006 sampai dengan 2009, program ini telah berhasil meningkatkan persentase guru yang telah memenuhi kualifikasi akademik D4/S1 menjadi sebesar 24,6 persen untuk SD, 24 persen untuk MI, 73,4 persen untuk SMP, 58 persen untuk MTs, 91,2 persen untuk SMA, 85,8 persen untuk SMK, dan 77 persen untuk MA.

Selanjutnya, dalam rangka meningkatkan tata kelola pendidikan dilakukan berbagai perbaikan manajemen pendidikan yang ditujukan untuk memantapkan manajemen pelayanan pendidikan dan memberdayakan sekolah melalui penerapan manajemen berbasis sekolah (MBS) yang ditujukan untuk meningkatkan kemandirian, kemitraan, keterbukaan, akuntabilitas, dan peran serta masyarakat. Untuk meningkatkan standar dan kualitas tata kelola pendidikan baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, telah dilakukan penjaminan mutu pekerjaan manajerial dan administratif sesuai dengan Permendiknas Nomor 15 Tahun 2007 Tentang Sistem Perencanaan Tahunan dan Permendiknas Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Koordinasi dan Pengendalian Program. Pada jenjang pendidikan tinggi, upaya pengembangan sistem yang transparan dan akuntabel telah dilaksanakan secara bertahap sejak tahun 1990-an melalui pembiayaan berbasis kompetisi seperti hibah bersaing di perguruan tinggi (PT). Sebuah kemajuan penting telah terjadi terkait upaya pelembagaan otonomi yang lebih luas dan mendorong satuan pendidikan untuk secara lebih profesional melakukan pengelolaan menuju efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Badan Hukum Pendidikan (BHP).

Perubahan status menjadi BHP untuk satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah merupakan pilihan, sedangkan untuk perguruan tinggi merupakan keharusan.

Seiring dengan makin meningkatnya komitmen dari semua pihak, anggaran pendidikan dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan yang berarti. Pada tahun 2009, anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBN dan APBD dapat diwujudkan. Secara nasional anggaran pendidikan mencapai Rp 207,4 triliun yang dialokasikan melalui Belanja Pemerintah Pusat dan Transfer Daerah. Anggaran tersebut meningkat secara signifikan dari anggaran tahun 2005 sebesar Rp 81,25 triliun. Di samping itu, kemitraan antara publik dan swasta dalam penyelenggaraan pendidikan juga terus mengalami perkembangan.

Perpustakaan merupakan salah satu sarana untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan membangun kepribadian melalui penyediaan bahan pustaka yang dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Ditetapkannya Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan menunjukkan semakin pentingnya peran perpustakaan dalam mentransformasikan ilmu pengetahuan (iptek) secara demokratis menuju masyarakat cerdas, kritis dan inovatif, di samping sebagai pelestari nilai budaya (*culture building*) di masyarakat. Berbagai upaya yang telah dilakukan, telah menunjukkan hasil yang cukup menggembirakan, antara lain ditandai oleh (1) meningkatnya sarana dan prasarana layanan perpustakaan; (2) tersedianya 321 unit perpustakaan keliling di perpustakaan provinsi dan perpustakaan kabupaten/kota; (3) promosi budaya baca melalui media cetak dan elektronik; (4) berkembangnya 5.187 unit perpustakaan desa di 30 provinsi; (5) meningkatnya apresiasi masyarakat terhadap pentingnya layanan perpustakaan dalam pembangunan; dan (6) terselenggaranya program studi perpustakaan di perguruan tinggi baik pada jenjang diploma, sarjana maupun pascasarjana sebagai upaya untuk menyiapkan SDM perpustakaan yang profesional.

Pemberdayaan Pemuda dan Prestasi Olahraga. Pembangunan pemuda dan olahraga memiliki peran penting dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pembangunan di bidang pemuda dan olahraga telah memberikan kemajuan yang cukup berarti dan menjadi landasan pelaksanaan pembangunan pemuda dan olahraga pada periode 2010–2014. Berbagai kemajuan yang dicapai di bidang pemuda, di antaranya adalah meningkatnya peran dan partisipasi pemuda di berbagai bidang pembangunan. Hal ini, antara lain, ditunjukkan oleh: (1) meningkatnya angka partisipasi sekolah (APS) pemuda, yaitu APS penduduk usia 16–18 tahun meningkat dari 53,86 persen pada 2005 menjadi 54,1 pada 2007; APS penduduk usia 19–24 tahun, meningkat dari 12,23 persen pada 2005 menjadi 12,61 pada 2007 (Susenas, 2007); (2) menurunnya tingkat pengangguran terbuka (TPT) pemuda dari 17,65 persen pada 2006 menjadi 14,35 persen pada 2008 (Sakernas, 2008); (3) meningkatnya pemuda yang mengikuti kegiatan organisasi dari 51,1 persen pada 2003 menjadi 69,09 persen pada 2006 (Susenas, 2006); (4) meningkatnya kepemimpinan dan kepeloporan pemuda; dan



(5) disahkannya Undang-Undang Kepemudaan sebagai landasan utama dalam pembangunan kepemudaan.

Berbagai kemajuan pembangunan di bidang olahraga, antara lain adalah meningkatnya budaya dan prestasi olahraga yang ditandai oleh: (1) tumbuhnya kesadaran masyarakat dalam melakukan kegiatan olahraga terutama di satuan pendidikan. Data Susenas 2003 dan 2006 menunjukkan bahwa persentase penduduk berumur 10 tahun ke atas yang melakukan olahraga di sekolah meningkat dari 54,1 persen pada tahun 2003 menjadi 58,2 persen pada tahun 2006; (2) meningkatnya prestasi olahraga yang, antara lain, ditunjukkan oleh perolehan medali emas di beberapa cabang olahraga di tingkat internasional seperti di Asian Games 2006 di Doha, SEA Games 2007 di Thailand, Para Games 2007 di Thailand, Olimpiade ke-29 tahun 2008 di Beijing; dan naiknya peringkat Indonesia dari peringkat 4 pada SEA Games tahun 2007 menjadi peringkat 3 pada SEA Games tahun 2009.

Kehidupan Beragama. Pembangunan bidang agama merupakan bagian integral pembangunan nasional yang bertujuan untuk mewujudkan Indonesia yang damai, adil, demokratis dan sejahtera. Pembangunan bidang agama adalah upaya untuk memenuhi salah satu hak dasar rakyat yang dijamin oleh konstitusi. Negara dan pemerintah berkewajiban memberikan jaminan dan perlindungan atas hak setiap warganya untuk memeluk agama dan beribadah menurut agamanya, serta memberikan fasilitasi dan pelayanan pemenuhan hak dasar warga tersebut. Dengan demikian, aspek perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak beragama sebagai bagian dari hak asasi warga negara menjadi landasan pokok dalam pembangunan bidang agama. Di samping itu, pembangunan bidang agama mempertimbangkan berbagai capaian sebelumnya, kondisi dan permasalahan yang dihadapi, perubahan peraturan perundang-undangan, dan berbagai isu strategis.

Sejumlah perkembangan penting yang dicapai dalam pembangunan bidang agama, antara lain, adalah meningkatnya kualitas kehidupan umat beragama; meningkatnya bimbingan dan penerangan keagamaan; meningkatnya kehidupan harmonis umat beragama yang ditandai dengan menurunnya konflik sosial bernuansa keagamaan, berdirinya forum-forum kerukunan, dan berkembangnya kerjasama lintas agama; meningkatnya kualitas dan pemerataan pelayanan keagamaan, termasuk berkembangnya pengelolaan sumber dana keagamaan secara lebih produktif; meningkatnya kualitas penyelenggaraan haji dan umrah; menguatnya kapasitas lembaga sosial keagamaan dan lembaga pendidikan keagamaan; meningkatnya kapasitas sumber daya keagamaan; dan berkembangnya pusat-pusat informasi keagamaan.

Di samping itu, kemajuan di bidang kebijakan dan penguatan tata kelola pembangunan bidang agama ditandai dengan diterbitkannya sejumlah peraturan perundang-undangan baru di bidang agama; revisi sejumlah kebijakan pelayanan keagamaan; meningkatnya penyelenggaraan reformasi birokrasi, pengembangan sistem

pengawasan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas kinerja pembangunan bidang agama. Berbagai keberhasilan yang dicapai tersebut akan menjadi modal penting dalam pembangunan bidang agama.

Jati Diri Bangsa dan Pelestarian Budaya. Pengembangan kebudayaan yang diarahkan untuk memperkuat jati diri dan karakter bangsa dengan berlandaskan pada nilai-nilai luhur dalam periode 2004–2009 telah memberikan kemajuan yang cukup berarti dan menjadi landasan pelaksanaan pembangunan kebudayaan pada periode 2010–2014. Berbagai kemajuan yang dicapai, di antaranya adalah semakin pulih dan terpeliharanya kondisi aman dan damai dilihat dari menurunnya ketegangan dan ancaman konflik antarkelompok masyarakat, serta semakin kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika. Hal ini ditunjukkan, antara lain, oleh: (1) semakin berkembangnya pemahaman terhadap pentingnya kesadaran keragaman budaya yang ditandai oleh menurunnya eskalasi konflik/perkelahian antarkelompok warga di tingkat desa (dari 2.583 desa pada tahun 2003 menjadi 1.235 desa (109,2 persen) pada tahun 2008; BPS, Podes 2008); (2) tumbuhnya sikap saling menghormati dan menghargai keberagaman budaya yang ditandai dengan perkembangan persentase persepsi masyarakat terhadap kebiasaan bersilaturahmi¹ (79,22 persen); persentase persepsi masyarakat terhadap kegiatan gotong royong² (84,6 persen), serta persentase persepsi masyarakat terhadap kebiasaan tolong-menolong antarsesama warga³ (90,4 persen) (BPS, Susenas 2006); (3) semakin berkembangnya proses internalisasi nilai-nilai luhur, pengetahuan dan teknologi tradisional, serta kearifan lokal yang relevan dengan tata kehidupan bermasyarakat dan bernegara, seperti nilai-nilai persaudaraan, solidaritas sosial, saling menghargai, serta rasa cinta tanah air; (4) meningkatnya apresiasi masyarakat terhadap hasil karya seni budaya dan perfilman yang ditandai oleh penyelenggaraan berbagai pameran, festival, pagelaran, dan pentas seni dan film, pemberian penghargaan di bidang seni dan film, serta pengiriman misi kesenian ke berbagai acara internasional sebagai bentuk promosi kesenian nasional Indonesia; (5) tumbuhnya kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap pengelolaan kekayaan dan warisan budaya yang ditandai oleh meningkatnya kesadaran, kebanggaan, dan penghargaan masyarakat terhadap nilai-nilai sejarah bangsa Indonesia, meningkatnya upaya perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan benda cagar budaya (BCB)/situs, serta berkembangnya peran dan fungsi museum sebagai sarana rekreasi dan edukasi; dan (6) meningkatnya kerjasama yang sinergis antarpihak terkait dalam upaya pengembangan nilai budaya, pengelolaan keragaman budaya serta perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan warisan budaya.

Taraf Kesejahteraan Sosial. Selama periode 2004–2009, pemerintah telah

¹ Persentase persepsi masyarakat terhadap kebiasaan bersilaturahmi (kadang-kadang, sering dan lebih baik)

² Persentase persepsi masyarakat terhadap kegiatan gotong-royong (sedang, sama baik, dan lebih baik)

³ Persentase persepsi masyarakat terhadap kebiasaan tolong menolong antar sesama warga (baik dan sama baik)

menyelenggarakan berbagai pelayanan kesejahteraan sosial, antara lain, berupa: (a) program keluarga harapan (PKH) yaitu bantuan tunai bersyarat bagi rumah tangga sangat miskin (RTSM) yang memenuhi syarat bidang kesehatan (ibu hamil dan anak di bawah lima tahun) dan pendidikan (anak berusia sekolah wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun); (b) bantuan sosial yang ditujukan bagi masyarakat miskin berkebutuhan khusus seperti penyandang cacat, anak terlantar dan lanjut usia terlantar; korban bencana alam dan bencana sosial; (c) rehabilitasi sosial untuk mengembalikan fungsi sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS); dan (d) pemberdayaan sosial bagi fakir miskin dan komunitas adat terpencil (KAT) dalam bentuk pemenuhan kebutuhan dasar, pendampingan sosial, dan pemberdayaan. Adapun cakupan pelayanan kesejahteraan sosial yang bersifat khusus pada PMKS, tampak pada Tabel 2.3.

TABEL 2.3
CAKUPAN LAYANAN TERHADAP PMKS DI INDONESIA TAHUN 2008

PMKS	Unit	Populasi	Dilayani	
			Jumlah	% Populasi
Lanjut Usia	jiwa	2.021.769	64.930	3,2%
Anak Terlantar	jiwa	2.367.693	67.768	2,9%
Anak Jalanan	jiwa	107.778	17.500	16,2%
Penyandang Cacat	jiwa	1.163.508	80.942	7,0%
Tuna Sosial	jiwa	1.436.199	20.882	1,5%
Anak Nakal	jiwa	201.653	14.583	7,2%
Korban NAPZA	jiwa	138.619	20.332	14,7%
Bencana Alam	KK	2.843.935	369.874	13,0%
Korban Tindak Kekerasan/Pekerja Migran	jiwa	266.603	37.993	14,3%
Komunitas Adat Terpencil	KK	270.065	12.049	4,5%

Catatan: Populasi PMKS menggunakan data tahun 2007 dan sesuai data realisasi anggaran Departemen Sosial tahun 2008

Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan. Peningkatan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan

pembangunan yang dapat dinikmati secara adil, efektif, dan akuntabel oleh seluruh penduduk Indonesia, baik laki-laki maupun perempuan. Berbagai kemajuan dalam pembangunan yang responsif gender telah dicapai baik di bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi, maupun dalam bidang politik dan jabatan publik. Selain indikator IPG, kemajuan pembangunan gender juga ditunjukkan dengan indikator *gender empowerment measurement* (GEM) atau indeks pemberdayaan gender (IDG), yang diukur melalui partisipasi perempuan di bidang ekonomi, politik, dan pengambilan keputusan. IDG Indonesia menunjukkan peningkatan dari 0,597 pada tahun 2004 menjadi 0,621 pada tahun 2007 (KNPP-BPS, 2008).

Di bidang ekonomi, peningkatan akses lapangan kerja bagi perempuan ditunjukkan oleh penurunan angka pengangguran terbuka perempuan dari 13,7 persen pada tahun 2006, menjadi 8,8 persen pada tahun 2009 (Sakernas, 2006–2009). Dalam jabatan publik, terdapat sedikit peningkatan partisipasi perempuan selama kurun waktu tiga tahun terakhir, terutama dari partisipasinya dalam pengambilan keputusan. Pada tahun 2006, persentase perempuan yang menduduki jabatan eselon I sampai eselon IV, masing-masing sebesar 9,6 persen; 6,6 persen; 13,7 persen; dan 22,4 persen. Pada tahun 2008, persentase tersebut untuk eselon II sampai eselon IV, masing-masing meningkat menjadi 7,1 persen; 14,5 persen; dan 23,5 persen. Di bidang politik, partisipasi perempuan di lembaga legislatif meningkat dari 11,3 persen pada tahun 2004 menjadi 17,9 persen pada tahun 2009. Demikian pula, anggota DPD perempuan meningkat dari 19,8 persen pada tahun 2004 menjadi 27,3 persen pada tahun 2009.

Sementara itu, kemajuan yang dicapai di bidang hukum dan peraturan perundang-undangan yang mendukung peningkatan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, antara lain, adalah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPP); Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah; dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah. Ditetapkannya undang-undang tersebut sekaligus menjadi dasar yang kuat bagi pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat untuk meningkatkan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan melalui upaya pencegahan, pelayanan, dan pemberdayaan.

Sampai dengan tahun 2008, telah dibentuk Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) di 17 provinsi dan 76 kabupaten/kota. Selain itu, Kepolisian RI telah menyediakan 305 unit perlindungan perempuan dan anak

(UPPA) di tingkat Polres yang tersebar di seluruh Indonesia. Selanjutnya, untuk meningkatkan pelayanan terhadap perempuan korban perdagangan orang, telah dilakukan peningkatan kapasitas petugas di tempat embarkasi dan debarkasi.

Perlindungan Anak. Pembangunan perlindungan anak telah dilakukan sesuai dengan pasal 28B ayat 2 UUD 1945 dan prinsip-prinsip perlindungan anak menurut Konvensi Hak-hak Anak (KHA), yaitu non-diskriminasi (pasal 2); mempertimbangkan kepentingan terbaik anak (pasal 3); dan menghargai partisipasi anak (pasal 12). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak lebih lanjut telah menegaskan bahwa perlindungan anak mencakup anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, dan mencakup hak-hak anak untuk hidup, tumbuh dan berkembang, mencegah segala bentuk kekerasan, eksploitasi, perdagangan, dan diskriminasi, serta melindungi hak-hak anak untuk didengar pendapatnya. Selanjutnya, untuk memenuhi kesepakatan MDGs dan *A World Fit for Children* (WFFC), pada tahun 2005 telah dicanangkan Program Nasional Bagi Anak Indonesia (PNBAI) 2005–2015, yang akan diintegrasikan dalam RPJMN 2010–2014.

Keberhasilan pembangunan perlindungan anak dalam memenuhi hak tumbuh kembang dan kesejahteraan anak ditunjukkan dengan capaian pembangunan di bidang kesehatan dan pendidikan yang semakin baik, serta menurunnya jumlah pekerja anak. Di samping itu, telah disusun pula standar prosedur operasional pemulangan korban perdagangan anak, baik dari dalam wilayah RI maupun lintas batas negara.

Peraturan perundang-undangan sebagai basis hukum dalam perlindungan anak juga telah mencatat kemajuan, antara lain, dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik khususnya yang terkait pemidanaan terhadap pornografi anak.

2.2 Permasalahan, Tantangan dan Sasaran Pembangunan

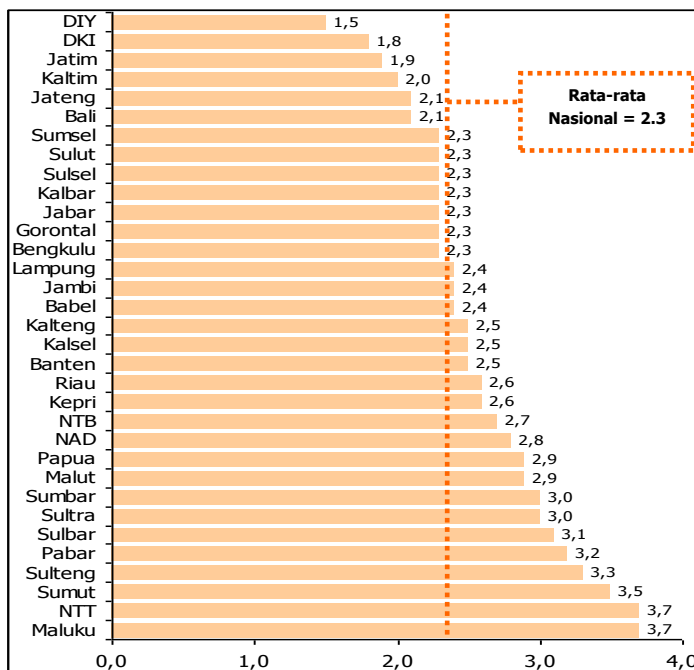
2.2.1 Permasalahan dan Tantangan

2.2.1.1 Jumlah Penduduk yang Besar

Laju pertumbuhan dan jumlah pertambahan penduduk masih tinggi. Walaupun laju pertumbuhan penduduk Indonesia cenderung menurun, secara absolut jumlahnya tetap besar dan masih akan meningkat sekitar 3 juta jiwa per tahun. Jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2000 sekitar 205,8 juta orang (SP, 2000), meningkat menjadi 218,9 juta orang pada tahun 2005 (Supas, 2005), dan diperkirakan akan terus meningkat menjadi 234,2 juta orang pada tahun 2010, serta menjadi sebanyak 245,0 juta orang pada tahun 2014 (Proyeksi penduduk Indonesia 2005–2025 berdasarkan parameter hasil Supas 2005). Dengan kondisi tersebut, Indonesia termasuk negara

dengan jumlah penduduk terbesar ke empat di dunia setelah Cina, India dan Amerika Serikat. *Tantangan ke depan adalah mengendalikan TFR yang merupakan faktor dominan dalam mempengaruhi laju pertumbuhan dan jumlah pertambahan penduduk di Indonesia.*

GAMBAR 2.1
TOTAL FERTILITY RATE (TFR) PER PROVINSI
TAHUN 2007



Sumber: SDKI, 2007 dan BPS, 2009

⁴ TFR setelah dikoreksi

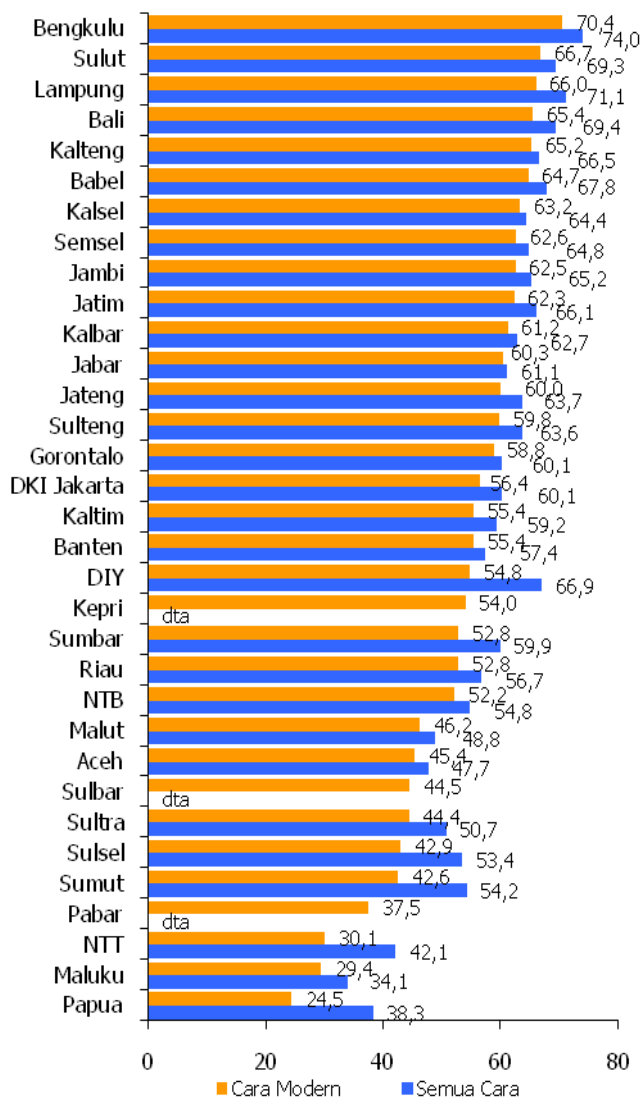
⁵ TFR sebelum dikoreksi

dibandingkan dengan perempuan berpendidikan tinggi (2,7). *Karena itu, upaya meningkatkan kesertaan ber-KB dan akses terhadap pelayanan KB di daerah dengan TFR tinggi serta penyediaan pelayanan KB gratis bagi penduduk miskin dan rentan lainnya merupakan tantangan yang akan dihadapi.*

Disparitas TFR masih tinggi. Berdasarkan hasil SDKI, TFR cenderung menurun namun belum mencapai sasaran ideal, yaitu 2,1. Selain itu, TFR sangat bervariasi antarwilayah, menurut kondisi sosial dan ekonomi. Hasil SDKI 2007 menunjukkan bahwa TFR terendah berada pada tingkat 1,5 di D.I. Yogyakarta dan tertinggi 3,7 di NTT dan Maluku⁴. Sementara itu, TFR di perdesaan lebih tinggi (2,8) dibandingkan dengan perkotaan (2,3)⁵. Oleh karena itu, rata-rata jumlah anak yang dilahirkan pada kelompok miskin (4,2) lebih banyak dibandingkan dengan kelompok yang lebih mampu (3,0). Selanjutnya, rata-rata jumlah anak yang dilahirkan oleh perempuan yang berpendidikan rendah (4,1) lebih banyak

Pemakaian kontrasepsi masih rendah. Angka pemakaian kontrasepsi (*Contraceptive Prevalence Rate/CPR*) masih rendah dan bervariasi antarprovinsi,

GAMBAR 2.2
CONTRACEPTIVE PREVALENCE RATE (CPR)
PER PROVINSI TAHUN 2007



Keterangan : dta = data tidak ada

Sumber: SDKI, 2007 dan BPS, 2009

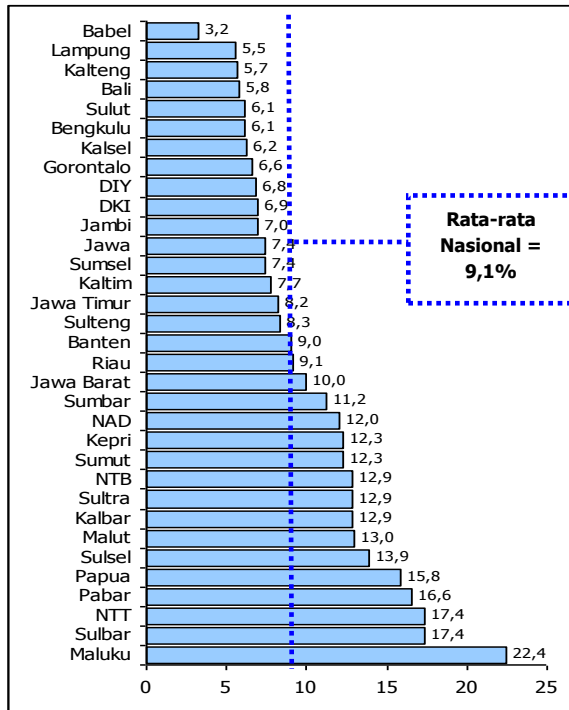
cenderung menurun, yaitu dari sekitar 6 persen (SDKI, 2002–2003) menjadi sekitar 5

antarwilayah, dan antarstatus sosial. Bila dilihat hasil SDKI 2002–2003 dan 2007, CPR tidak memperlihatkan peningkatan yang berarti, yaitu masing-masing dari 56,7 persen menjadi 57,4 persen untuk cara modern dan dari 60,3 persen menjadi 61,4 persen untuk semua cara. CPR terendah untuk semua cara terdapat di Maluku sebesar 34,1 persen dan untuk cara modern di Papua sebesar 24,5 persen. Sementara itu, CPR tertinggi untuk semua cara dan cara modern terdapat di Bengkulu, masing-masing sebesar 74,0 persen dan 70,4 persen. Kesenjangan CPR antarprovinsi mengindikasikan kurang meratanya jangkauan program KB ke seluruh daerah. Selain itu, sebagian besar penggunaan kontrasepsi secara nasional adalah hormonal dan bersifat jangka pendek, dengan penggunaan terbanyak pada suntikan. Penggunaan suntikan meningkat dari 28 persen pada tahun 2002 (SDKI, 2002–2003) menjadi 32 persen pada tahun 2007 (SDKI, 2007). Sementara itu, pemakaian kontrasepsi yang bersifat jangka panjang, seperti sterilisasi (tubektomi dan vasektomi), IUD, dan implan

persen (SDKI, 2007).

Lebih lanjut, peserta KB pria terhadap total pasangan usia subur (PUS) berdasarkan hasil SDKI 2007 baru mencapai 2,5 persen, dibandingkan dengan sasaran RPJMN 2004–2009, yaitu sebesar 4,5 persen. Kesertaan pria dalam pemakaian kontrasepsi juga masih sulit ditingkatkan yang disebabkan oleh masih sangat terbatasnya pilihan metode kontrasepsi pria (hanya kondom dan vasektomi) dan masih sangat kuatnya budaya patriarki di masyarakat yang menganggap bahwa KB adalah urusan perempuan. *Tantangan yang dihadapi ke depan adalah upaya meningkatkan kesertaan ber-KB di daerah dengan CPR rendah, meningkatkan pemakaian kontrasepsi jangka panjang, dan meningkatkan kesertaan pria dalam ber-KB.*

GAMBAR 2.3
UNMET NEED PER PROVINSI TAHUN 2007



Sumber data: SDKI, 2007

Unmet need masih tinggi.

Jumlah pasangan usia subur yang ingin menunda kehamilan atau tidak menginginkan tambahan anak tetapi tidak ber-KB (*unmet need*), meningkat dari 8,6 persen (SDKI, 2002–2003) menjadi 9,1 persen (SDKI, 2007). *Unmet need* sangat bervariasi antarprovinsi, terendah di Bangka Belitung (3,2 persen) dan tertinggi di Maluku (22,4 persen). Selain itu, *unmet need* yang tinggi ditemukan di daerah perdesaan (9,2 persen), daerah tertinggal, terpencil, serta perbatasan (20,4 persen), dan pada kelompok yang tidak berpendidikan (10,6 persen). Tingginya *unmet need* juga disebabkan oleh ketakutan akan efek samping dan ketidaknyamanan pemakaian kontrasepsi, yang sekaligus mencerminkan masih rendahnya kualitas pelayanan KB. *Untuk itu, upaya intensifikasi advokasi dan KIE serta peningkatan akses dan kualitas pelayanan KB terutama di daerah tertinggal, terpencil, serta perbatasan dan daerah dengan unmet need tinggi*

merupakan tantangan yang dihadapi ke depan.

Pengetahuan dan kesadaran remaja dan pasangan usia subur tentang KB dan kesehatan reproduksi masih rendah. Survei Kesehatan Reproduksi Remaja Indonesia (SKRRI) 2007, mengungkapkan terdapatnya remaja yang menyetujui



hubungan seksual pra-nikah. Selanjutnya, SDKI 2007 menunjukkan 60 persen wanita kawin dengan 2 anak, 75 persen wanita kawin dengan 3-4 anak hidup, dan 80 persen wanita kawin dengan 5 atau lebih anak hidup, tidak menginginkan menambah anak lagi. Kecenderungan ini berpotensi meningkatkan kehamilan yang tidak diinginkan dan aborsi yang tidak aman jika tidak diikuti dengan upaya peningkatan pemahaman kesehatan reproduksi bagi remaja, serta penyediaan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi bagi PUS. *Tantangan ke depan adalah upaya peningkatan KIE dan penyediaan layanan KB dan kesehatan reproduksi bagi remaja dan PUS.*

Partisipasi keluarga dalam pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak dan remaja belum optimal. Salah satu upaya meningkatkan pengetahuan keluarga dalam pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak dan remaja adalah melalui pembinaan kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) dan Bina Keluarga Remaja (BKR). Data BKKBN menunjukkan jumlah kelompok BKB menurun secara signifikan dari 106.755 kelompok pada tahun 2005 menjadi 69.573 kelompok pada tahun 2007. Jumlah kelompok BKR juga menurun dari 43.752 kelompok pada tahun 2005 menjadi 29.248 kelompok pada tahun 2007. *Tantangan ke depan adalah meningkatkan akses keluarga terhadap informasi pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak dan remaja.*

Pembinaan dan kemandirian peserta KB belum optimal. Peningkatan jumlah peserta KB baru menemui hambatan pada saat CPR telah mencapai di atas 50 persen. Hal ini disebabkan oleh PUS yang belum ber-KB pada umumnya adalah kelompok-kelompok sulit yang tersebar di daerah-daerah terpencil, tertinggal, kelompok miskin, dan berpendidikan rendah. Untuk mencapai kelompok-kelompok tersebut, diperlukan upaya inovatif yang, antara lain, dapat dilakukan melalui pembinaan kelompok-kelompok kegiatan (poktan) di tingkat akar rumput, dengan menyediakan akses terhadap sumber permodalan. *Tantangan ke depan adalah meningkatkan peran kelompok-kelompok kegiatan yang ada di tingkat masyarakat sebagai media dalam meningkatkan kesertaan ber-KB.*

Kapasitas kelembagaan Program KB masih terbatas. Dengan ditetapkannya PP Nomor 38 Tahun 2007 dan PP Nomor 41 Tahun 2007, KB sudah menjadi urusan wajib bagi pemerintah daerah dan kelembagaannya menjadi satu rumpun dengan urusan pemberdayaan perempuan. Sampai dengan akhir tahun 2009, bentuk kelembagaan KB bervariasi antardaerah yang menunjukkan komitmen pemerintah daerah yang rendah. Sekitar 81,95 persen kelembagaan KB di kabupaten/kota diwujudkan dalam bentuk badan, 16,08 persen berbentuk kantor, dan 1,96 persen berbentuk dinas. Sekitar 90,87 persen kelembagaan KB digabungkan dengan 1 atau 2 bidang lain yang kurang relevan, dan hanya 9,13 persen yang utuh, serta beberapa kabupaten/kota tidak memiliki institusi untuk melaksanakan program KB. Jumlah pengendali lapangan atau pengawas PLKB (PPLKB) dan petugas lapangan KB (PLKB) atau penyuluh KB (PKB), yang merupakan salah satu kunci penentu keberhasilan program KB, mengalami penurunan menjadi 75 persen dari jumlah sebelum

desentralisasi. *Tantangan ke depan adalah meningkatkan advokasi kepada pemerintah daerah tentang pentingnya program KB, dan meningkatkan jumlah dan kompetensi tenaga pengelola serta pelaksana program KB di daerah.*

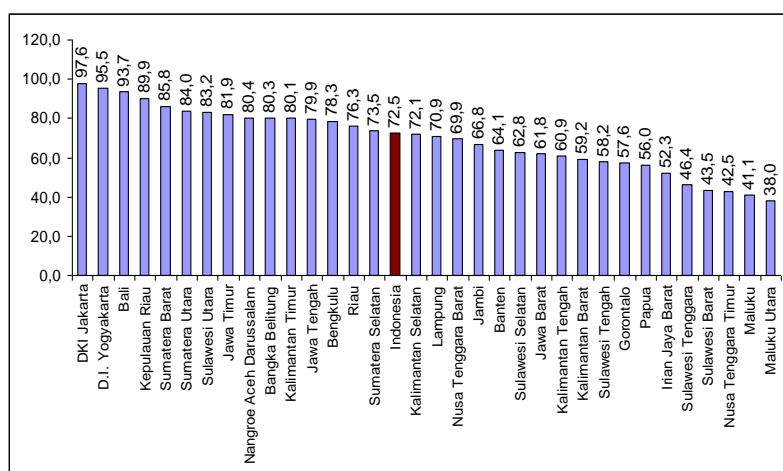
Kebijakan pengendalian penduduk belum sinergis. Kebijakan kependudukan yang terkait dengan kuantitas, kualitas, dan mobilitas belum konsisten baik secara vertikal maupun horisontal, serta masih terdapat kebijakan pembangunan lainnya yang kurang mendukung kebijakan pengendalian kuantitas penduduk. Mengingat penanganan masalah kependudukan melibatkan berbagai sektor dan pemangku kepentingan, sinergi para pemangku kepentingan tersebut harus ditingkatkan untuk mewujudkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing. *Tantangan ke depan adalah menyerasikan kebijakan kependudukan agar konsisten dan berkesinambungan.*

Ketersediaan dan kualitas data dan informasi kependudukan masih terbatas. Sumber data kependudukan yang mutakhir seharusnya berasal dari registrasi penduduk yang meliputi data kelahiran, kematian, dan perpindahan. Sampai saat ini data registrasi belum dapat dimanfaatkan secara optimal karena masih rendahnya cakupan daerah dan kejadian yang dilaporkan, kurangnya jumlah dan rendahnya kualitas tenaga pencatat, dan rendahnya kesadaran masyarakat dalam melaporkan perubahan atas peristiwa penting yang dialaminya. Hal ini terjadi karena kurangnya informasi tentang kewajiban masyarakat untuk melapor dan terbatasnya jangkauan masyarakat ke tempat pelayanan. *Tantangan ke depan adalah meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya melaporkan kejadian vital, serta meningkatkan cakupan dan kualitas data kependudukan dari berbagai sumber.*

2.2.1.2 Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan yang Rendah

Status kesehatan ibu dan anak masih rendah. Kesehatan ibu dan anak merupakan indikator penting dalam pembangunan kesehatan, selain menunjukkan

GAMBAR 2.4
PERSENTASE PERSALINAN YANG DITOLONG OLEH
TENAGA KESEHATAN PER PROVINSI TAHUN 2007



Sumber: Susenas, 2007

kinerja pelayanan kesehatan nasional juga menjadi komitmen internasional dalam pencapaian target MDGs (Goals 4 dan 5). Kesehatan ibu ditandai dengan indikator AKI yang selama empat tahun terakhir telah menurun secara signifikan menjadi 228 per 100 ribu kelahiran hidup pada tahun 2007. Namun, untuk mengejar sasaran MDGs menjadi 102 per 100 ribu

kelahiran hidup pada akhir tahun 2015 diperlukan upaya dan kerja keras untuk mencapainya.

Rendahnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan ibu menjadi penyebab utama masih tingginya kematian ibu. Kondisi ini ditandai dengan rendahnya kepatuhan ibu (*compliance*) dalam menjaga kesehatan dan rendahnya pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan terlatih sebesar 72,5 persen pada tahun 2007 (tertinggi di DKI Jakarta sebesar 97,6 persen dan terendah di Maluku Utara sebesar 38,0 persen) seperti ditunjukkan dalam Gambar 2.4. Di samping itu, tingginya kematian ibu melahirkan dipengaruhi juga oleh rendahnya status gizi ibu hamil, terbatasnya sarana Pelayanan Obstetrik Neonatal Emergensi Dasar (PONED), Pelayanan Obstetrik Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK), pos bersalin desa (Polindes) dan unit transfusi darah. Selain itu, ibu yang melahirkan difasilitasi pelayanan kesehatan baru mencapai sekitar 46 persen akibat kendala jarak dan biaya, dan karena masalah budaya masyarakat.

Selanjutnya, kesehatan anak ditandai dengan indikator kematian bayi (AKB), kematian balita (AKBA) dan kematian neonatal (usia 0–28 hari) yang selama empat tahun terakhir mengalami perlambatan penurunan. Data SDKI menunjukkan penurunan AKB dari 35 menjadi 34 per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2007, namun masih jauh lebih tinggi dari target AKB dalam MDGs pada tahun 2015 sebesar 23 per 1000 kelahiran hidup. AKBA juga mengalami penurunan dari 46 menjadi 44 per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2007. Sementara itu, angka kematian neonatal menurun sedikit dari 20 menjadi 19 per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2007. Kematian

TABEL 2.4
CAKUPAN IMUNISASI ANAK USIA 12-23 BULAN
DI INDONESIA TAHUN 2002/2003 - 2007

Imunisasi	SDKI 2002/03	SDKI 2007
BCG	82,5	85,4
DPT1	81,4	84,4
DPT2	71,1	75,7
DPT3	58,3	66,7
Polio1	87,3	88,8
Polio2	79,6	82,6
Polio3	66,1	73,5
Polio4	46,2	55,5
Campak	71,6	76,4
Imunisasi Lengkap	51,5	58,6
Tanpa Vaksinasi	10,2	8,6
Hepatitis B1	70,9	80,5
Hepatitis B2	58,1	71,7
Hepatitis B3	45,3	60,3

Sumber : SDKI,2002/2003 dan SDKI, 2007

neonatal memberikan kontribusi terhadap dua pertiga kematian bayi, sehingga perhatian terhadap upaya penurunan angka kematian neonatal menjadi penting. Penyebab tingginya kematian bayi dan kematian neonatal terutama berkaitan dengan cakupan dan kualitas imunisasi yang masih rendah.

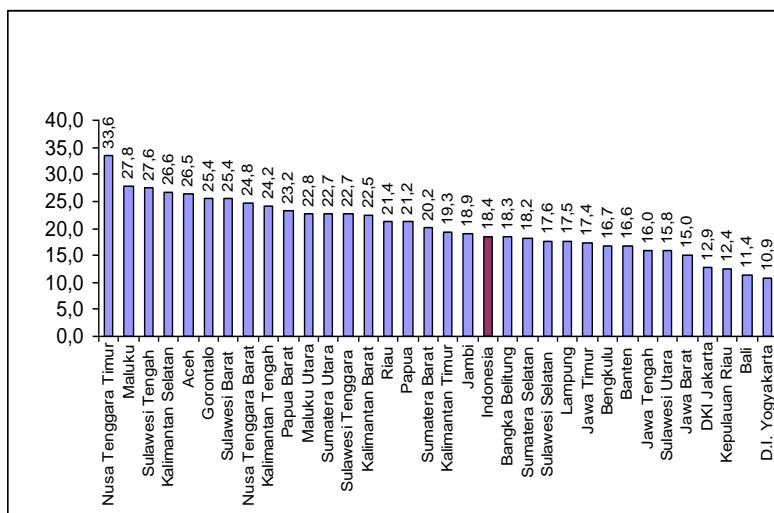
Cakupan imunisasi lengkap anak balita baru mencapai 58,6 persen (SDKI, 2007) meningkat dari 51,5 persen (SDKI, 2002–2003), sedangkan cakupan imunisasi campak baru mencapai 76,4 persen (SDKI, 2007) meningkat dari 71,6 persen (SDKI,

2002–2003), seperti ditunjukkan pada Tabel 2.4. Kualitas imunisasi masih perlu ditingkatkan mengingat tingkat *drop out* untuk DPT1 ke DPT3 masih 12 persen. Demikian pula, pemberian imunisasi tepat waktu masih rendah, yaitu DPT3 masih 54 persen dan campak 46 persen (Survei Cakupan Imunisasi Nasional, 2007).

Selain itu, tingginya kematian bayi dan neonatal disebabkan oleh masih rendahnya status gizi ibu hamil; masih rendahnya pemberian air susu ibu (ASI) eksklusif; masih tingginya angka kesakitan terutama diare, asfiksia, dan infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) akibat buruknya kondisi kesehatan lingkungan, seperti rendahnya cakupan air bersih dan sanitasi, dan kondisi perumahan yang tidak sehat; serta belum optimalnya pemanfaatan posyandu di samping determinan sosialbudaya lainnya. *Tantangan ke depan adalah meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak melalui perbaikan gizi, peningkatan pengetahuan ibu, pemenuhan ketersediaan tenaga kesehatan, penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan, dan peningkatan cakupan dan kualitas imunisasi, serta meningkatkan kualitas kesehatan lingkungan.*

Status gizi masyarakat masih rendah. Kekurangan gizi pada anak balita telah menurun, namun masih tetap menjadi masalah kesehatan masyarakat yang cukup

GAMBAR 2.5
ANGKA KEKURANGAN GIZI PADA BALITA
PER PROVINSI TAHUN 2007



Sumber: Riskesdas, 2007

antarprovinsi (seperti ditunjukkan pada Gambar 2.5).

Selain kekurangan energi dan protein, permasalahan gizi yang lain adalah kurang vitamin A (KVA), kurang yodium (gangguan akibat kurang yodium/ GAKY), anemia gizi

penting. Gangguan pertumbuhan yang ditandai dengan rendahnya berat badan dan tinggi badan telah terjadi sejak usia dini (4 bulan), dan terus berlanjut sampai usia balita. Hal tersebut terutama disebabkan oleh rendahnya status gizi ibu hamil. Prevalensi kekurangan gizi pada anak balita adalah sebesar 18,4 persen terdiri dari gizi-kurang 13,0 persen dan gizi-buruk 5,4 persen (Riskesdas, 2007). Namun, masih terjadi disparitas angka kekurangan gizi yang cukup besar

besi dan kekurangan zat gizi mikro lainnya, seperti ditunjukkan pada Tabel 2.5. Kekurangan gizi pada waktu yang lama menyebabkan tingginya prevalensi anak balita yang pendek. Di samping itu, status gizi ibu hamil yang masih rendah juga menjadi salah satu penyebab masih tingginya bayi lahir dengan berat badan rendah (BBLR). Sementara itu, keadaan gizi-lebih menunjukkan kecenderungan yang meningkat.

TABEL 2.5
PERMASALAHAN GIZI MASYARAKAT LAINNYA TAHUN 2007

No	Indikator	Status (persen)
1	Prevalensi anak balita yang pendek (<i>stunting</i>)	36,8
2	Prevalensi anak balita yang kurus dan sangat kurus (<i>wasting</i>)	13,6
3	Perempuan usia subur (15-45 tahun) mengalami kurang energi kronis (KEK)	13,6
4	Prevalensi bayi lahir dengan berat badan rendah (BBLR)	11,5
5	Prevalensi balita mengalami gizi lebih	4,3
6	Prevalensi penduduk usia diatas 15 tahun keatas mengalami obesitas (kelebihan berat badan)	10,3

Sumber: Riskesdas, 2007

Dalam penanganan masalah gizi, beberapa faktor yang mempengaruhi, antara lain, adalah masih tingginya angka kemiskinan; rendahnya kesehatan lingkungan; belum optimalnya kerjasama lintas sektor dan lintas program; melemahnya partisipasi masyarakat; terbatasnya aksesibilitas pangan pada tingkat keluarga terutama pada keluarga miskin; tingginya penyakit infeksi; belum memadainya pola asuh ibu; dan rendahnya akses keluarga terhadap pelayanan kesehatan dasar. Beberapa upaya perbaikan gizi yang telah dilaksanakan antara lain, pemberian makanan pendamping air susu ibu (MP-ASI); pemberian ASI eksklusif; pemberian kapsul vitamin A pada balita; dan pemberian tablet besi (Fe) pada ibu hamil, dengan cakupan sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 2.6.

TABEL 2.6
CAKUPAN UPAYA PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT TAHUN 2007

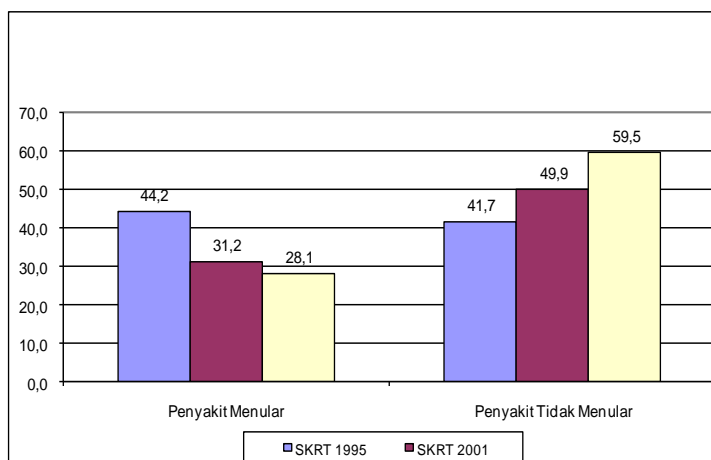
No	Indikator	Status (persen)
1	Bayi usia 6-9 bulan mendapat MP-ASI	75,0
2	Bayi yang mendapat ASI eksklusif selama 6 bulan	32,4
3	Anak usia 6 - 59 bulan yang menerima kapsul vitamin A	71,5
4	Ibu hamil menerima tablet besi (Fe)	77,3
5	Cakupan rumah tangga yang mengkonsumsi garam beryodium	62,3

Sumber: SDKI, 2007 dan Riskesdas, 2007

Tantangan ke depan adalah meningkatkan status gizi masyarakat dengan fokus pada ibu hamil dan anak usia 0-2 tahun, meningkatkan pola hidup sehat, menjamin kecukupan zat gizi dengan memperkuat kerjasama lintas sektor, meningkatkan pemberdayaan masyarakat, dan meningkatkan kualitas kesehatan lingkungan.

Angka kesakitan dan kematian akibat penyakit masih tinggi. Penyakit menular masih merupakan masalah kesehatan masyarakat, di samping terdapat kecenderungan peningkatan penyakit tidak menular, seperti ditunjukkan dalam Gambar

GAMBAR 2.6
KONTRIBUSI PENYAKIT TERHADAP KEMATIAN
DI INDONESIA



Sumber: SKRT,1995; SKRT, 2001; Riskesdas, 2007

2.6. Beberapa penyakit menular yang masih menjadi masalah kesehatan masyarakat, antara lain, Demam Berdarah Dengue (DBD), diare, malaria, tuberculosis (TB), human immunodeficiency virus (HIV) dan acquired immune deficiency syndrome (AIDS). Di samping itu, penyakit zoonotik dalam beberapa tahun terakhir muncul menjadi masalah kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan pandemik, seperti flu burung dan influenza tipe A baru (virus H1N1). Jumlah kasus H1N1 meningkat pesat, namun

tingkat keganasannya lebih rendah dari flu burung. Indonesia juga masih dihadapkan pada beberapa penyakit yang terabaikan (*neglected infectious diseases*) seperti kusta, *frambusia* (patek), *filariasis* (kaki gajah), *schistosomiasis* (demam keong). Penyakit tidak menular (PTM) cenderung terus meningkat terutama hipertensi, jantung koroner, diabetes mellitus, kanker, gangguan mental emosional, dan trauma. Permasalahan penyakit menular dan tidak menular secara lebih jelas ditunjukkan dalam Tabel 2.7.

TABEL 2.7
PENYAKIT MENULAR DAN TIDAK MENULAR YANG MENJADI MASALAH KESEHATAN MASYARAKAT

No	Jenis Penyakit	Indikator	Status
A	<i>Penyakit Menular</i>		
1	Demam Berdarah Dengue (DBD)	Jumlah kasus	136.333 ^{c)}
		<i>Case Fatality Rate</i> (CFR)	0,86 persen ^{c)}
2	Diare	Jumlah kasus	8.443 ^{c)}
		<i>Case Fatality Rate</i> (CFR)	2,48 persen ^{c)}
3	Malaria	<i>Annual Parasite Index</i> (API)	0,16 per 1.000 penduduk ^{c)}
		<i>Annual Malaria Incidence</i>	16,82 per 1.000 penduduk ^{c)}
4	<i>Tuberculosis</i>	Angka Penemuan Kasus/ <i>Case Detection Rate</i> (CDR) TB	73 persen ^{c)}
		Angka Penyembuhan TB	91 persen ^{a)}
5	HIV dan AIDS	Jumlah Kasus	22.125 kasus ^{c)}
		Prevalensi HIV	0,2 persen ^{c)}
		Proporsi Kasus AIDS	5,23 per 100.000 penduduk ^{c)}
6	Flu Burung	<i>Case Fatality Rate</i> (CFR)	81,56 persen ^{c)}
B	<i>Penyakit Tidak Menular</i>		
1	Hipertensi	Prevalensi hipertensi penduduk umur lebih dari 18	7,6 persen ^{b)}
2	Jantung koroner	Prevalensi jantung koroner	7,2 persen ^{b)}
3	Diabetes mellitus	Prevalensi diabetes mellitus	1,1 persen ^{b)}
4	Tumor	Prevalensi tumor	0,4 persen ^{b)}
5	Gangguan mental emosional	Prevalensi gangguan mental emosional pada penduduk umur lebih dari 15 tahun	11,6 persen ^{b)}
6	Kecelakaan	Jumlah kasus kematian akibat kecelakaan	11.610 kasus ^{b)}

Catatan: Data pada tahun ^{a)} 2006; ^{b)} 2007; ^{c)} 2008

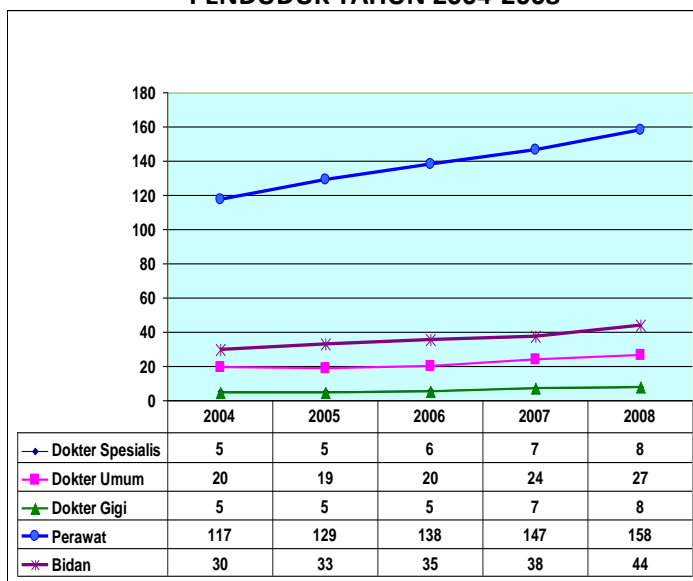
Masih tingginya angka kesakitan dan kematian akibat penyakit menular dan tidak menular disebabkan oleh masih buruknya kondisi kesehatan lingkungan, perilaku masyarakat yang belum mengikuti pola perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), dan belum optimalnya upaya-upaya penanggulangan penyakit. Faktor risiko utama pada penyakit tidak menular, antara lain, pola makan yang tidak sehat, kegiatan fisik yang kurang/tidak aktif, dan kebiasaan merokok (29,2 persen). Rendahnya kondisi kesehatan lingkungan ditandai dengan rumah tangga yang memiliki akses kepada air bersih nonperpipaan baru mencapai 57,2 persen, sedangkan rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak sebesar 69,3 persen (Laporan MDGs, 2007). Kondisi ini juga dipengaruhi oleh perubahan iklim global yang memicu meningkatnya beberapa faktor risiko penyakit menular. *Tantangan ke depan adalah meningkatkan cakupan dan kualitas pencegahan penyakit, pengendalian faktor risiko, peningkatan surveilans epidemiologi, peningkatan kegiatan komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE), peningkatan tatalaksana kasus, peningkatan kesehatan lingkungan, penguatan kerjasama lintas sektor, serta kesiapsiagaan menghadapi pandemi penyakit zoonotik.*

Ketersediaan tenaga kesehatan masih terbatas. Jumlah, jenis, dan kualitas tenaga kesehatan terus meningkat, tetapi distribusinya belum merata. Rasio tenaga kesehatan per 100.000 penduduk untuk dokter, dokter spesialis, dokter gigi, perawat, dan bidan mengalami peningkatan mulai dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2008, seperti ditunjukkan dalam Gambar 2.7. Jika dibandingkan dengan negara-negara lain di regional Asia Tenggara, Indonesia memiliki jumlah dan rasio tenaga dokter yang relatif masih rendah, misalnya di Filipina (58) dan Malaysia (70) tenaga dokter per 100.000 penduduk. Sementara itu, penyebaran tenaga dokter lebih banyak di Pulau Jawa-Bali

dibandingkan dengan luar Pulau Jawa-Bali. Walaupun rasio dokter dengan penduduk relatif seimbang antara Pulau Jawa-Bali (18,5 per 100.000 penduduk) dan di luar Pulau Jawa-Bali (18,1 per 100.000 penduduk), karena karakteristik geografis yang lebih sulit di luar Pulau Jawa-Bali, hal ini menyebabkan akses penduduk terhadap tenaga kesehatan menjadi terbatas.

Kesenjangan tenaga kesehatan lebih jelas terlihat antara daerah perkotaan dan perdesaan baik dari segi jumlah maupun rasionya. Penempatan tenaga kesehatan di daerah

GAMBAR 2.7
RASIO TENAGA KESEHATAN PER 100.000
PENDUDUK TAHUN 2004-2008



Sumber : Departemen Kesehatan, 2008

terpencil, tertinggal dan perbatasan terus ditingkatkan, dan berhasil menempatkan dokter spesialis menjadi 1.025 orang (2007); dokter/dokter gigi menjadi 3.905 (2007); dan bidan desa menjadi 18.317 orang (2007). Kualitas tenaga kesehatan juga masih rendah akibat belum optimalnya sistem akreditasi institusi pendidikan kesehatan dan sertifikasi lulusan. *Tantangan ke depan adalah memperbaiki kualitas perencanaan, produksi dan pendayagunaan yang menjamin terpenuhinya jumlah, mutu, dan persebaran SDM kesehatan terutama di daerah terpencil, tertinggal, perbatasan dan daerah kepulauan yang didukung dengan penguatan regulasi termasuk akreditasi dan sertifikasi.*

Ketersediaan obat dan pengawasan obat-makanan masih terbatas. Ketersediaan dan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan terus membaik, tetapi keterjangkauan, penggunaan dan mutu obat, serta pengawasan obat dan makanan masih belum optimal. Ketersediaan obat esensial di tingkat puskesmas mencapai lebih dari 80 persen. Hingga saat ini, terdapat sekitar 16.000 jenis obat yang terdaftar dan 400 jenis obat tercantum dalam daftar obat esensial nasional (DOEN), 220 di antaranya merupakan obat generik esensial. Selain itu, Indonesia telah memiliki kemampuan dalam penyediaan vaksin baik untuk kebutuhan dalam negeri maupun ekspor. Sektor pengobatan tradisional cukup beragam dan substansial, serta secara luas masih digunakan terutama di daerah perdesaan. Obat tradisional produksi rumah tangga berkembang menjadi industri dengan lebih dari 900 industri kecil dan 130 industri menengah, 69 di antaranya telah mendapat sertifikat *good traditional medicine manufacturing practice (GTMMP)*. Perkembangan industri obat tradisional ini didukung dengan potensi 9.600 jenis tanaman yang mempunyai efek pengobatan, dan 300 di antaranya telah digunakan sebagai bahan baku industri.

Dalam hal pemerataan obat, saat ini terdapat sekitar 2.600 agen (*wholesaler*) yang beroperasi di tingkat kabupaten kota, walaupun kesemuanya terafiliasi pada 10 distributor nasional. Obat-obatan dapat diakses oleh masyarakat melalui berbagai gerai (*outlet*). Saat ini tercatat sekitar 8.300 apotek dan 6.600 toko obat. Obat-obat esensial untuk pelayanan dasar juga tersedia di seluruh puskesmas dan rumah sakit baik pemerintah maupun swasta. Dari segi ketenagaan, jumlah tenaga farmasi terus meningkat. Saat ini diperkirakan terdapat sekitar 14.600 apoteker dengan 3000–4000 lulusan apoteker baru setiap tahun dari sekitar 60 institusi pendidikan. Untuk menjaga keterjangkauan harga obat pemerintah telah mengeluarkan kebijakan tentang pengaturan harga obat esensial. Mekanisme penetapan harga obat sektor swasta saat ini diserahkan kepada pasar karena merupakan komoditas perdagangan. Harga sebagian besar obat di Indonesia berada dalam rata-rata harga internasional. Walaupun harga obat relatif terjangkau, ancaman fluktuasi harga obat masih tinggi, antara lain, karena tingginya ketergantungan pada bahan baku obat dari luar negeri, yaitu sekitar 80–85 persen. Selain itu, harga obat masih relatif mahal akibat biaya transportasi.

Dalam penggunaan obat, telah dilakukan upaya penyuluhan dan penyebaran informasi agar obat digunakan secara tepat dan rasional, serta menghindari penyalahgunaan dan kesalahan penggunaan obat. Persebaran obat generik di puskesmas cukup

tinggi (90 persen), sedangkan di rumah sakit dan apotik masih rendah, yaitu rumah sakit umum (66 persen), serta rumah sakit swasta dan apotik (49 persen). Upaya penggunaan obat rasional dilaksanakan dengan penerapan konsep obat esensial, penggunaan obat generik serta promosi/informasi penggunaan obat rasional dalam bentuk DOEN. Tuntutan masyarakat untuk mendapatkan perlindungan terhadap peredaran produk obat dan makanan yang tidak memenuhi persyaratan makin meningkat. Keamanan makanan masih belum terjamin, yang ditandai dengan penyalahgunaan formalin, penyalahgunaan bahan berbahaya lain, cemaran mikroba dalam produk makanan termasuk pada jajanan anak sekolah, serta berbagai peralatan dan kemasan makanan yang mengandung bahan kimia berbahaya. Di samping itu, peredaran narkotika, psikotropika, dan zat adiktif (NAPZA) ilegal di Indonesia tidak terlepas dari kondisi global dunia. Saat ini Indonesia tidak saja menjadi negara tujuan dan transit perdagangan NAPZA ilegal, tetapi telah menjadi produsen NAPZA ilegal, khususnya golongan *Amphetamine Type Stimulate* (ATS), dengan semakin meningkatnya temuan laboratorium ilegal (*clandestine laboratory*) belakangan ini. *Tantangan ke depan adalah meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemerataan obat dengan terus meningkatkan produksi obat nasional melalui pemanfaatan bahan baku obat dalam negeri, pengawasan peredaran NAPZA ilegal, peningkatan penegakan hukum sebagai tindak lanjut dari hasil penyidikan terhadap pelanggaran, serta pengawasan obat dan makanan yang dilakukan secara komprehensif dan sistemik dari produksi hingga konsumsi.*

Pembiayaan kesehatan untuk memberikan jaminan perlindungan kesehatan masyarakat masih terbatas. Pembiayaan kesehatan cenderung meningkat, tetapi belum sepenuhnya dapat memberikan jaminan perlindungan kesehatan masyarakat. Pengeluaran kesehatan total (*total health expenditure*) pada periode 2004–2008 mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Anggaran pemerintah pusat dan daerah naik 4 kali lipat dalam 5 tahun terakhir. Jika dibandingkan dengan rekomendasi WHO, yaitu sebesar USD 35–40 per kapita per tahun, anggaran pemerintah (*public health expenditure*) ini telah mencapai 70 persen dari rekomendasi WHO tersebut. Pengeluaran kesehatan total dan pengeluaran anggaran kesehatan oleh pemerintah terhadap PDB relatif lebih rendah jika dibandingkan dengan negara-negara ASEAN. Total pengeluaran anggaran kesehatan di Indonesia pada tahun 2008 sebesar 2 persen dari PDB (World Bank, 2009). Sebagai perbandingan, pada tahun 2005 rasio pengeluaran total kesehatan terhadap PDB di Brunei (3,5), Kamboja (12), Malaysia (3,8), Filipina (2,9), Singapura (4,3), Thailand (4,4) dan Vietnam (5,2) persen. Rekomendasi WHO mengenai anggaran kesehatan adalah sekitar 5 persen dari PDB. Pembiayaan kesehatan sebagian besar masih berasal dari pemerintah pusat dan kontribusi pemerintah daerah walaupun menunjukkan kecenderungan meningkat, masih kecil. Sumber pembiayaan kesehatan di daerah terutama berasal dari APBD, dana alokasi khusus (DAK), dana dekonsentrasi, dan dana perbantuan.

Anggaran tersebut terutama digunakan untuk membiayai pelayanan kesehatan



bagi penduduk miskin (Askeskin/Jamkesmas), peningkatan upaya keterjangkauan harga obat, dan bantuan pemerintah pada institusi pelayanan kesehatan pusat di daerah. Dengan pertimbangan Indonesia perlu untuk melakukan percepatan pencapaian sasaran-sasaran MDGs seperti penurunan AKI, AKB, penyakit menular, gizi, air bersih dan sanitasi dasar, perlu dilakukan peningkatan anggaran kesehatan yang cukup signifikan. Tingkat penyerapan dana (realisasi anggaran APBN) masih rendah, terutama karena *public financial management* secara keseluruhan yang belum mantap. Efisiensi alokatif dan efisiensi teknis pembiayaan pemerintah masih belum optimal dan masih cenderung lebih banyak untuk penyediaan sarana dan prasarana kesehatan daripada untuk pembiayaan operasional. Ke depan pembiayaan kesehatan akan diarahkan untuk mencapai keseimbangan pembiayaan kegiatan preventif, promotif, kuratif, dan rehabilitatif.

Dalam rangka perlindungan terhadap risiko finansial akibat masalah kesehatan, cakupan asuransi kesehatan di Indonesia masih rendah, yaitu masih sekitar 48 persen dengan rincian 18,7 persen asuransi kesehatan pegawai negeri sipil (PNS), TNI/POLRI, tenaga kerja di sektor formal dan asuransi swasta bagi penduduk yang mampu, serta 29,3 persen Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas). Kelompok masyarakat pada sektor informal sebagian besar belum tercakup dalam sistem jaminan pelayanan kesehatan. Jaminan pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin telah mampu meningkatkan akses penduduk miskin terhadap pelayanan kesehatan baik di puskesmas maupun di rumah sakit, tetapi belum sepenuhnya dapat meningkatkan status kesehatan masyarakat miskin terutama untuk daerah tertinggal, terpencil, perbatasan dan kepulauan. Cakupan sasaran Jamkesmas meningkat dari 36,4 juta orang (2005) menjadi 76,4 juta orang (2007). *Tantangan ke depan adalah meningkatkan pembiayaan kesehatan yang diikuti oleh peningkatan perlindungan finansial terhadap risiko kesehatan yang mencakup seluruh penduduk Indonesia serta peningkatan efisiensi penggunaan anggaran.*

Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan kesehatan belum optimal.

Pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan diwujudkan dalam bentuk promosi kesehatan dan UKBM seperti Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) dan Pos Kesehatan Desa (Poskesdes). Upaya ini ditujukan untuk memberdayakan individu, keluarga, dan masyarakat agar mampu melaksanakan upaya pemeliharaan kesehatan secara mandiri. Pada tahun 2006 tercatat sekitar 270.000 posyandu. Peran posyandu dalam sistem pelayanan kesehatan cukup penting terutama dalam kegiatan imunisasi, gizi, dan upaya kesehatan ibu dan anak (KIA), KB, penanggulangan diare, dan penyuluhan kesehatan masyarakat. Integrasi kegiatan posyandu dengan kegiatan lain seperti Pos Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Bina Keluarga Balita (BKB) dan Tempat Penitipan Anak (TPA) perlu terus ditingkatkan dalam rangka pengembangan anak usia dini secara holistik dan terintegrasi. Pada tahun 2008 telah tersedia lebih dari 43.000 poskesdes sebagai bagian dari infrastruktur Desa Siaga. Belum optimalnya upaya pemberdayaan masyarakat disebabkan, antara lain, belum dipadukannya kegiatan UKBM dengan kegiatan yang

berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat.

Kegiatan promosi kesehatan dikembangkan melalui konsep PHBS yang ditandai dengan sepuluh (10) indikator yaitu: (1) pertolongan ibu melahirkan oleh tenaga kesehatan, (2) pemberian ASI eksklusif pada bayi umur 0-6 bulan, (3) kebiasaan merokok, (4) aktivitas fisik, (5) konsumsi sayur dan buah, (6) penggunaan jamban sehat, (7) akses terhadap air bersih, (8) kesesuaian luas lantai dengan penghuni, (9) jenis lantai rumah bukan tanah (kedap air), dan (10) kepemilikan jaminan kesehatan. Pencapaian sasaran PHBS pada tingkat rumah tangga sampai saat ini masih rendah yaitu 36,3 persen pada tahun 2007. Pencapaian ini masih lebih rendah jika dibandingkan dengan target pada tahun 2009 sebesar 60 persen akibat belum intensifnya kegiatan promosi kesehatan. *Tantangan ke depan adalah peningkatan promosi kesehatan dan upaya kesehatan berbasis masyarakat melalui kerjasama lintas sektor yang didukung oleh kebijakan dan peraturan perundangan.*

Manajemen pembangunan kesehatan belum efektif. Efektivitas manajemen pembangunan kesehatan yang meliputi pengelolaan sistem informasi kesehatan, administrasi dan penataan hukum kesehatan, serta pengembangan dan pemanfaatan hasil penelitian pengembangan kesehatan masih belum optimal. Arus informasi data surveilans epidemiologi dari daerah ke pusat dan sebaliknya terutama yang berbasis fasilitas sejak desentralisasi mengalami berbagai hambatan. Ketersediaan data lebih mengandalkan hasil survei yang periode ketersediaannya belum sesuai dengan keperluan perencanaan dan evaluasi program. Instrumen pengelolaan administrasi bidang kesehatan telah disusun melalui berbagai perumusan kebijakan dan strategi pembangunan kesehatan yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Bidang Kesehatan 2005-2025, Rencana Pembangunan Kesehatan Menuju Indonesia Sehat 2010, Rencana Strategis (Renstra) Pembangunan Kesehatan 2005-2009, SKN, dan ditetapkannya Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan. Namun, konsistensi dan implementasi berbagai kebijakan tersebut perlu terus ditingkatkan antara RPJM, RKP, Renstra, serta dokumen penganggarannya.

Penyusunan peraturan perundang-undangan, harmonisasi peraturan, pelayanan advokasi hukum, peningkatan kesadaran hukum bagi aparatur kesehatan belum terlaksana dengan baik. Sementara itu, sebagian besar hasil penelitian dan pengembangan belum dimanfaatkan sebagai dasar pengambilan keputusan. Untuk itu, pada tahun 2007 telah dilakukan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) yang merupakan upaya baru dalam melengkapi data dasar untuk penyusunan kebijakan berbasis bukti. Kegiatan penelitian dan pengembangan kesehatan perlu terus ditingkatkan terutama dalam pengembangan produk obat dan vaksin, serta rancang bangun alat-alat kesehatan untuk mencapai kemandirian. *Tantangan ke depan adalah bagaimana meningkatkan efektivitas dan kualitas manajemen pembangunan kesehatan melalui penguatan sistem informasi dan surveilans kesehatan, pengelolaan administrasi dan hukum, serta penelitian dan pengembangan kesehatan.*



Kesenjangan status kesehatan dan gizi masyarakat antarwilayah dan antartingkat sosial ekonomi masih lebar. Status kesehatan dan gizi masyarakat terus membaik tetapi masih terjadi disparitas antarwilayah dan antartingkat sosial ekonomi. Secara umum status kesehatan masyarakat pada kawasan Indonesia bagian timur lebih rendah jika dibandingkan dengan kawasan Indonesia bagian barat. Sebagai contoh, AKB di Provinsi Sulawesi Barat sebesar 74, NTB sebesar 72, NTT sebesar 57, Papua sebesar 41 dibandingkan dengan DIY sebesar 19, Jawa Tengah sebesar 36, DKI sebesar 28 per 1000 kelahiran hidup. Demikian pula, masih terjadi disparitas status kesehatan antara daerah perkotaan dengan perdesaan. Status kesehatan di daerah perkotaan lebih baik jika dibandingkan dengan daerah perdesaan. Sebagai contoh, status gizi-kurang anak balita di daerah perkotaan sebesar 11,7 persen, sedangkan di desa 14,0 persen; status gizi-buruk anak balita di daerah perkotaan sebesar 4,2 persen, sedangkan di daerah perdesaan 6,4 persen.

Selain itu, disparitas terjadi antartingkat sosial ekonomi. Kelompok masyarakat miskin status kesehatannya cenderung lebih rendah jika dibandingkan dengan kelompok masyarakat mampu. Sebagai contoh, AKB pada kelompok masyarakat miskin sebesar 56, sedangkan pada kelompok masyarakat mampu sebesar 26 per 1.000 kelahiran hidup. Akses penduduk terhadap pelayanan kesehatan di daerah tertinggal, terpencil, perbatasan dan kepulauan masih rendah disebabkan oleh kesulitan geografis, ketersediaan sarana pelayanan kesehatan, tenaga dan biaya operasional. Faktor lain yang mempengaruhi disparitas adalah adanya perbedaan kemampuan fiskal masing-masing kabupaten/kota. Daerah dengan kemampuan fiskal rendah cenderung mempunyai kemampuan terbatas pada alokasi pembangunan kesehatan. *Tantangan ke depan adalah memperbaiki kesenjangan status kesehatan dan gizi masyarakat antarwilayah dan antartingkat sosial ekonomi melalui pemihakan kebijakan, pengalokasian sumber daya, pengembangan instrumen monitoring serta peningkatan advokasi dan capacity building untuk daerah tertinggal.*

Akses masyarakat terhadap fasilitas pelayanan kesehatan yang berkualitas masih rendah. Secara nasional, jumlah fasilitas pelayanan kesehatan terus meningkat namun aksesibilitas masyarakat terutama penduduk miskin di daerah tertinggal, terpencil, perbatasan dan kepulauan terhadap fasilitas pelayanan kesehatan masih terbatas. Pada tahun 2007, rasio puskesmas terhadap penduduk adalah 3,6 per 100.000 penduduk. Selain itu, jumlah puskesmas pembantu (Pustu) dan puskesmas keliling (Pusling) terus meningkat. Akses masyarakat dalam mencapai sarana pelayanan kesehatan dasar cukup baik, yaitu 94 persen masyarakat dapat mengakses sarana pelayanan kesehatan kurang dari 5 kilometer (km) (Riskesdas, 2007). Akses masyarakat terhadap UKBM cukup baik, ditandai dengan 78,9 persen rumah tangga berada kurang dari satu kilometer dari fasilitas UKBM tersebut. Walaupun akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan di puskesmas dan jaringannya sudah cukup bagus, kualitas pelayanannya masih perlu ditingkatkan, terutama pelayanan kesehatan preventif dan promotif. Untuk itu, kinerja puskesmas di bidang pelayanan kesehatan preventif dan

promotif yang meliputi KIA-KB, gizi, imunisasi, kesehatan lingkungan, promosi kesehatan, pencegahan penyakit dan pembinaan upaya kesehatan berbasis masyarakat seperti posyandu, polindes, dan poskesdes perlu ditingkatkan dengan penyediaan dukungan biaya operasional untuk puskesmas. Di beberapa wilayah masih terdapat penduduk yang mengalami kendala jarak dan waktu untuk mencapai fasilitas pelayanan kesehatan. Kondisi ini diperburuk dengan kondisi jaringan jalan dan listrik yang masih belum memadai.

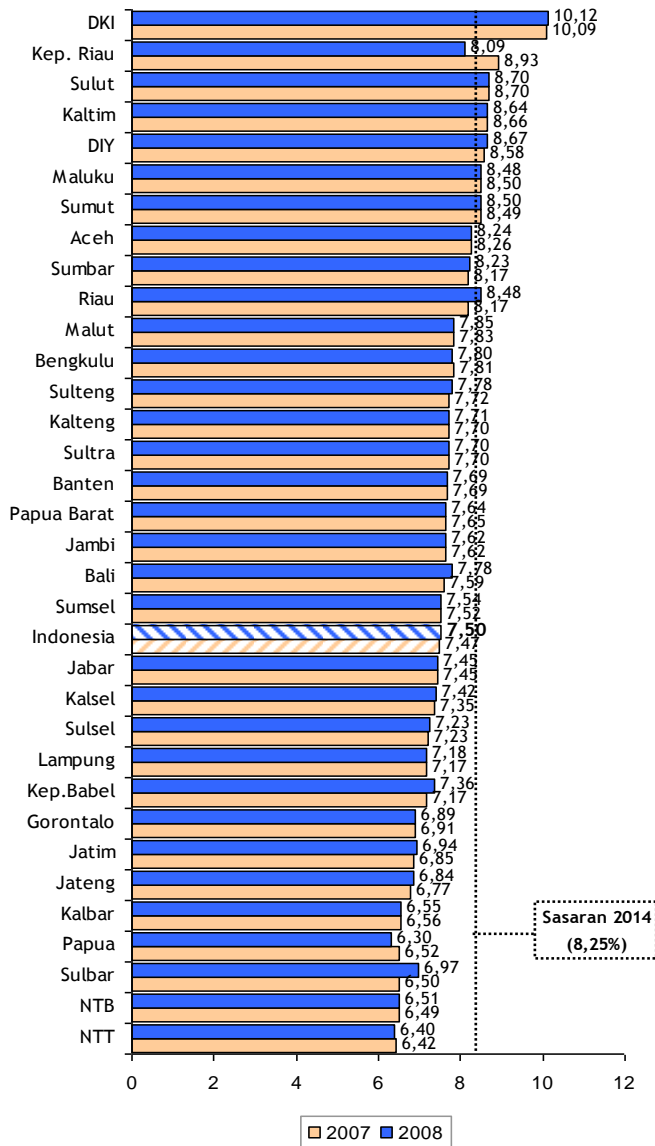
Jumlah rumah sakit umum (RSU) pemerintah meningkat dari 625 (2004) menjadi 667 (2007), sedangkan rumah sakit swasta meningkat dari 621 menjadi 652. Pada tahun 2007, rasio tempat tidur (TT) rumah sakit terhadap penduduk sebesar 63,3 TT per 100.000 penduduk (*Profil Kesehatan, 2007*). Rasio ini masih lebih rendah jika dibandingkan target nasional tahun 2009 sebesar 75 TT per 100.000 penduduk. Selain itu, sistem rujukan belum optimal walaupun utilisasi fasilitas kesehatan meningkat pesat. Hal lain yang perlu mendapat perhatian dalam meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan adalah pelayanan kesehatan bagi penduduk usia produktif dan lanjut usia (lansia) yang jumlahnya cenderung semakin besar. Diperkirakan jumlah penduduk lansia pada tahun 2014 sebanyak 14,1 juta (5,9 persen dari total penduduk). Masalah pelayanan kesehatan lain yang perlu mendapat perhatian adalahantisipasi kebutuhan pelayanan kesehatan bagi penduduk di daerah rawan bencana dan di daerah yang rawan terjadinya konflik sosial. Letak geografis Indonesia yang berada di antara dua lempeng bumi rawan terhadap terjadinya bencana alam. Selain itu, keragaman etnis yang seharusnya menjadi kekuatan bangsa seringkali berpotensi menimbulkan konflik sosial. *Tantangan ke depan adalah meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat melalui penyediaan sarana dan fasilitas pelayanan kesehatan yang memadai untuk merespons dinamika karakteristik penduduk dan kondisi geografis.*

Tantangan strategis lain yang perlu mendapat perhatian dalam pembangunan kesehatan mencakup upaya percepatan pencapaian sasaran MDGs, adaptasi dan mitigasi terhadap dampak perubahan iklim global (climate change) di bidang kesehatan, respons terhadap pemberlakuan pasar bebas, penguatan desentralisasi di bidang kesehatan, serta mempersempit disparitas status kesehatan antarwilayah, antartingkat sosial ekonomi, dan gender.

2.2.1.3 Akses, Kualitas dan Relevansi Pendidikan yang Rendah

Kesempatan memperoleh pendidikan masih terbatas. Kesempatan masyarakat untuk memperoleh pendidikan terus mengalami peningkatan dari waktu ke waktu. Hal ini, antara lain, ditunjukkan oleh meningkatnya rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas dari 7,27 tahun pada tahun 2005 menjadi 7,50 tahun pada tahun 2008 (Susenas, BPS). Persebaran angka rata-rata lama sekolah ditunjukkan pada Gambar 2.8.

GAMBAR 2.8
PERSEBARAN ANGKA RATA-RATA LAMA



Sumber: Susenas, 2008

Sementara itu, peningkatan akses terhadap pendidikan juga ditunjukkan dengan angka partisipasi pendidikan yang terus meningkat di semua jenjang pendidikan, seperti yang ditunjukkan pada Tabel 2.8. Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen keempat mengamanatkan bahwa pendidikan dasar wajib bagi setiap warga negara dan wajib dibiayai oleh pemerintah. Namun, belum seluruh anak usia 7–15 tahun mendapat pelayanan pendidikan dasar, sebagian di antaranya sama sekali belum pernah terlayani oleh sistem pendidikan (*the unreached*), putus sekolah, atau tidak melanjutkan ke SMP/MTs/SMPLB/Paket B, baik karena kendala geografis maupun biaya. Dengan merujuk sasaran MDGs, wajib belajar yang bermutu diharapkan tuntas sebelum 2014, tetapi sampai saat ini masih terdapat 1,08 juta siswa yang tidak menyelesaikan pendidikan dasar (Depdiknas, 2006/07).

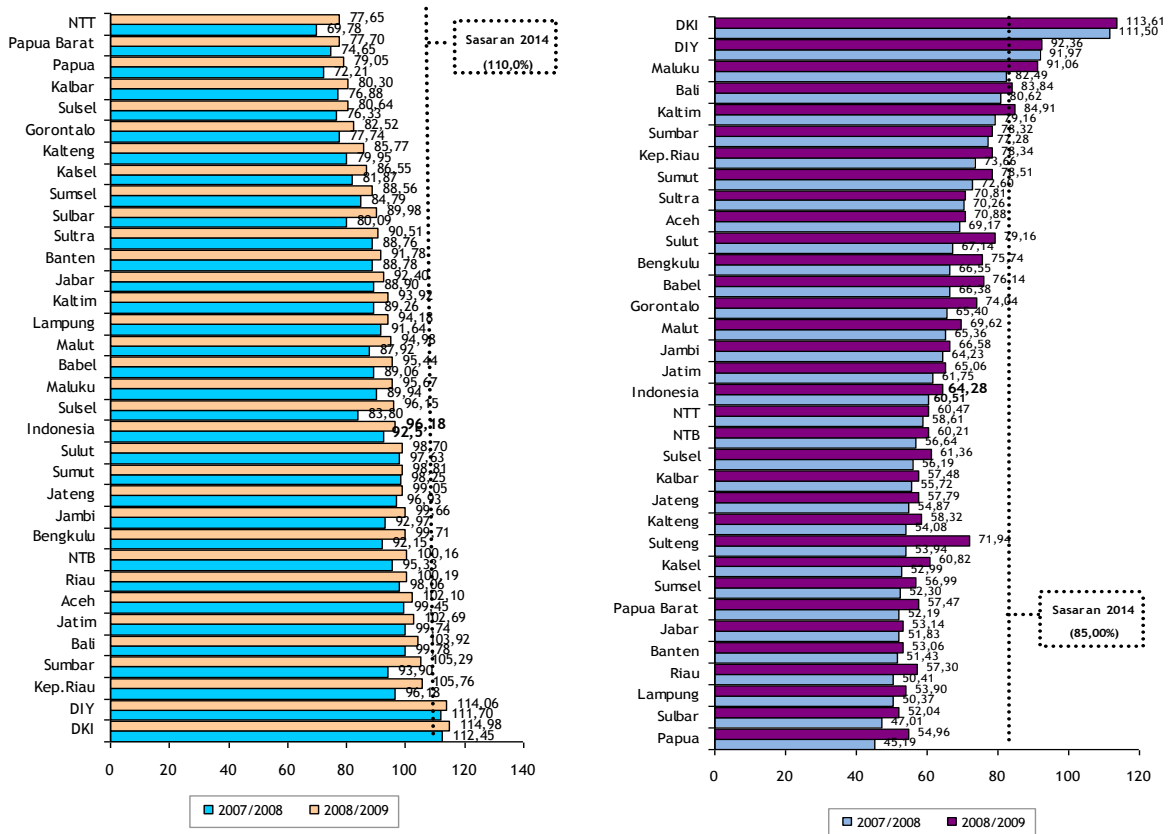
TABEL 2.8
CAPAIAN KINERJA PENINGKATAN DAN PERLUASAN AKSES PENDIDIKAN

No	Indikator Kunci Sukses	2004	2005	2006	2007	2008
1.	Angka Partisipasi Murni (APM) SD /MI/SDLB/Paket A	94,12%	94,30%	94,48%	94,90%	95,14%
2.	APK SMP/MTs/SMPLB/ Paket B	81,22%	85,22%	88,68%	92,52%	96,18%
3.	APK SMA/SMK/MA/ SMALB/Paket C	49,01%	52,20%	56,22%	60,51%	64,28%
4.	APK PT/PTA, termasuk UT (19-24 tahun)	14,62%	15,00%	16,70%	17,25%	17,75%
5.	Prosentase Buta Aksara > 15 th	10,21%	9,55%	8,07%	7,20%	5,97%

Catatan: APK Pendidikan Tinggi (kelompok usia 19-23 tahun) pada tahun 2008 adalah 21,26 persen

Selanjutnya, jumlah lulusan SMP/MTs/ sederajat yang meningkat sebagai dampak perluasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun membutuhkan peningkatan akses pendidikan menengah yang berkualitas. Saat ini belum semua lulusan SMP/MTs tertampung dalam jenjang pendidikan menengah sehingga APK SMA/SMK/MA dan sederajat pada tahun 2008 baru mencapai 64,28 persen. Variasi APK SMP/MTs/ sederajat dan APK SMA/SMK/MA/ sederajat antarprovinsi masih relatif tinggi seperti yang ditunjukkan pada Gambar 2.9.

GAMBAR 2.9
APK SMP/MTs/SEDERAJAT (KIRI) dan APK SMA/SMK/MA/SEDERAJAT ANTARPROVINSI



Sumber: Depdiknas, 2007/2008 dan 2008/2009

Sementara itu, APK jenjang pendidikan tinggi (PT) terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2008, APK PT telah mencapai 17,75 persen, mendekati sasaran RPJMN 2004–2009, yaitu 18,00 persen (Depdiknas). Namun, jika dibandingkan dengan APK PT di negara-negara ASEAN lainnya, tingkat partisipasi pendidikan tinggi di Indonesia masih relatif tertinggal. Apabila dibiarkan, kondisi ini akan memperlambat transformasi struktur pendidikan untuk tenaga kerja yang selanjutnya akan berdampak pada makin rendahnya daya saing bangsa. Selain itu, perluasan akses pada jenjang pendidikan tinggi perlu diikuti dengan adanya jaminan kualitas dan kesesuaian dengan kebutuhan masyarakat. Tanpa diimbangi dengan peningkatan kualitas dan relevansi, APK PT yang tinggi akan mengakibatkan pengangguran terdidik yang besar sehingga berpotensi menimbulkan gejolak sosial.

Seiring dengan upaya peningkatan angka partisipasi pendidikan di berbagai jenjang di atas, pendidikan keberaksaraan juga mempunyai peran penting dalam meningkatkan taraf pendidikan masyarakat. Pendidikan keberaksaraan bertujuan untuk

menghasilkan kemampuan keberaksaraan yang lestari, melalui tahap penghapusan buta aksara, pemeliharaan kemampuan keberaksaraan, dan pelestarian kemampuan keberaksaraan. Kemampuan keberaksaraan secara umum terus mengalami peningkatan, tetapi disparitas kemampuan antarkelompok masih relatif tinggi. Disparitas ini dapat terlihat, antara lain, pada masih rendahnya kemampuan keberaksaraan kelompok penduduk perempuan, miskin, dan yang tinggal di perdesaan.

Selanjutnya, meningkatnya angka partisipasi pendidikan belum sepenuhnya diikuti penurunan kesenjangan tingkat pendidikan antarkelompok masyarakat. Masih banyak siswa dari kelompok berpenghasilan rendah yang belum terjangkau oleh layanan pendidikan. Selain itu, mereka yang berkesempatan masuk ke jenjang SD dan mengalami putus sekolah pada akhir kelas 6 mencapai sebesar 12 persen. Disparitas partisipasi pendidikan makin besar terutama pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Pada tahun 2007, APM SMP/MTs dari kelompok terkaya mencapai 37 persen lebih tinggi dari kelompok termiskin. Pada pendidikan tinggi kurang dari 5 persen mahasiswa berasal dari kelompok termiskin (Susenas, BPS).

Pada periode 2020–2025 Indonesia diperkirakan akan mengalami rasio ketergantungan penduduk terendah yang lazim disebut sebagai jendela kesempatan atau *window of opportunity*. Periode jendela kesempatan ini harus dimanfaatkan sebagai peluang besar bagi kemajuan bangsa melalui pendidikan yang merata dan berkualitas yang dilaksanakan sepanjang hayat sehingga kelompok usia produktif ini dapat menjadi tenaga kerja dengan produktivitas tinggi dan berpotensi mendorong ekonomi nasional tumbuh dengan sangat cepat di kemudian hari. Sebaliknya, apabila pendidikan tidak tersedia secara merata dan berkualitas, bangsa ini memiliki risiko menghadapi beban penduduk kelompok usia 7–15 tahun saat ini yang akan memasuki usia kerja pada periode 2020–2025.

Pendidikan sepanjang hayat perlu ditingkatkan dan diwujudkan sebagai kesatuan pendidikan formal dan non-formal yang diikuti oleh warga masyarakat. Ketika jenjang pendidikan tinggi sudah dilalui, hanya ada jalur pendidikan non-formal yang dapat diikuti oleh warga masyarakat lulusan perguruan tinggi tersebut. Demikian juga, ketika warga masyarakat lain menyelesaikan pendidikan dasar atau menengah dan kemudian bekerja, kendala umur menjadikan mereka hanya dapat mengakses pendidikan non-formal. Dengan demikian, sinergi pendidikan formal dan non-formal perlu terus ditingkatkan agar proses pembelajaran dapat berlangsung terus menerus sepanjang hayat.

Sementara itu, pendidikan agama mempunyai peran penting dalam memberikan pengetahuan dan membentuk sikap, kepribadian dan keterampilan peserta didik dalam mengamalkan ajaran agamanya, yang dilaksanakan sekurang-kurangnya melalui matapelajaran/kuliah pada semua jalur jenis dan jenjang pendidikan. Namun, belum seluruh peserta didik memperoleh pendidikan agama seperti yang diharapkan, yang antara lain, karena masih kurangnya guru agama, baik dalam hal jumlah maupun



kualitasnya, serta sumber belajar pendidikan agama. Bahkan, satuan pendidikan non-formal seperti PAUD dan Kelompok Belajar Paket A, B, dan C sama sekali belum memiliki pendidik atau tutor pendidikan agama. Selain itu, distribusi guru agama juga belum merata, yang ditandai dengan menumpuknya guru agama di daerah perkotaan. Di samping pendidikan agama, terdapat pendidikan keagamaan yang berfungsi untuk mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama.

Berdasarkan uraian di atas, *tantangan ke depan adalah memperluas kesempatan memperoleh pendidikan mencakup upaya untuk meningkatkan pemerataan dan efisiensi internal pendidikan dasar; meningkatkan akses terhadap pendidikan menengah yang berkualitas; meningkatkan partisipasi pendidikan tinggi; meningkatkan keberaksaraan, meningkatkan pemerataan akses pendidikan; menciptakan prakondisi bagi bonus demografi; dan meningkatkan akses pendidikan agama dan pendidikan keagamaan.*

Kualitas, relevansi, dan daya saing pendidikan masih rendah. Pendidikan yang berkualitas dan relevan memberikan bekal watak yang baik dan keterampilan dasar yang memadai yang memungkinkan lulusan bekerja dan berkembang secara lebih luwes sesuai dengan tuntutan lapangan kerja yang berkembang, seiring dengan pertumbuhan ekonomi. Keterampilan dasar yang dimaksud meliputi kemampuan berpikir analitis atau kemampuan kognitif, dan kemampuan berkomunikasi serta kemampuan untuk bekerja dalam tim (*soft skills*), sesuai dengan standar menurut jenjang pendidikannya.

Sejalan dengan semakin tingginya tingkat persaingan antarbangsa, penyiapan sumberdaya manusia yang berkualitas menjadi suatu hal yang tidak bisa ditunda lagi dalam rangka meningkatkan daya saing bangsa. Untuk itu, manusia Indonesia dituntut untuk lebih berketerampilan, berdaya saing tinggi, menguasai bahasa/komunikasi, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Berdasarkan data tahun 2009 terdapat 42,1 juta penduduk usia kerja muda 15–24 tahun. Sekitar 21,1 juta di antaranya telah masuk angkatan kerja, dan sekitar 22,2 persen (4,7 juta) menganggur (Sakernas, 2009). Sejalan dengan itu, hasil proyeksi angkatan kerja Indonesia 2000–2025 (Lembaga Demografi/LD UI) juga menunjukkan bahwa kualitas angkatan kerja di masa yang akan datang masih akan didominasi oleh tenaga kerja yang berpendidikan rendah.

Kualitas pendidikan di semua jenjang dipengaruhi oleh berbagai faktor yaitu kualitas dan kompetensi guru, kepemimpinan akademik dan manajerial di sekolah, prasarana dan sarana, sistem penjaminan mutu, dan ketersediaan dukungan sumberdaya finansial. Selain itu, kualitas pendidikan pada jenjang tertentu tidak dapat terlepas dari kualitas pendidikan pada jenjang di bawahnya, dan kualitas jenjang pendidikan dasar sangat dipengaruhi oleh kesiapan anak untuk bersekolah (*school readiness*).

Kesiapan anak untuk bersekolah merupakan fondasi yang penting dalam meningkatkan kinerja pendidikan karena rendahnya kesiapan bersekolah akan

berpengaruh pada angka mengulang dan angka putus sekolah. Angka mengulang kelas yang relatif lebih tinggi di kelas 1 SD/MI mengindikasikan ketidaksiapan belajar siswa di kelas 1 SD/MI. Oleh karena itu, pendidikan anak usia dini (PAUD) memiliki peran strategis untuk meningkatkan kesiapan anak untuk bersekolah. Angka partisipasi pendidikan anak usia dini terus mengalami peningkatan dari waktu ke waktu. Namun, tingkat partisipasi ini masih relatif tertinggal dibandingkan dengan tingkat partisipasi pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, dan disparitas tingkat partisipasi antara desa dan kota juga masih cukup besar. Angka partisipasi pendidikan anak-anak usia 5–6 tahun di perdesaan baru mencapai kurang dari dua-pertiga angka partisipasi anak-anak yang tinggal di perkotaan. Di samping itu, disparitas antarkelompok pendapatan juga sangat lebar; persentase anak yang belajar di TK dari kuintil termiskin sebesar separuh dari angka partisipasi mereka yang berasal dari kuintil terkaya.

Di samping itu, meningkatnya cakupan pelayanan PAUD belum sepenuhnya diikuti dengan peningkatan kualitas pelayanan seperti yang diharapkan. Hal ini, antara lain, terlihat pada tingkat kompetensi pendidik, fasilitas pendukung, serta intensitas layanan yang masih belum memadai. Kondisi saat ini, ketersediaan pendidik PAUD yang diindikasikan oleh rasio siswa-guru sudah cukup baik, tetapi hanya 10,76 persen di antaranya memiliki jenjang pendidikan sesuai dengan undang-undang. Sebagian besar layanan PAUD diselenggarakan dengan alat permainan edukatif (APE), tempat bermain, dan ruang belajar yang masih terbatas. Selanjutnya, frekuensi layanan yang masih rendah seperti Pos PAUD yang hanya satu kali seminggu atau BKB yang hanya sebulan sekali mengindikasikan rendahnya kualitas layanan tumbuh kembang anak.

Kemampuan penyediaan layanan PAUD relatif masih rendah. Dengan memasukkan seluruh pola PAUD yang ada, meliputi TK/ RA untuk anak usia 5–6 tahun, serta PAUD non-formal bagi anak usia 2–6 tahun, seperti kelompok bermain dan taman penitipan anak, satuan PAUD sejenis seperti PAUD terintegrasi BKB/posyandu (POS PAUD) dan Taman Asuh Anak Muslim (TAAM), serta berbagai program serupa seperti posyandu dan program Bina, APK PAUD masih jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan APM SD/MI yang sudah mencapai 95,14 persen dan APK SMP/MTs yang mencapai 96,18 persen pada akhir tahun 2008. Layanan yang ada belum mampu menjangkau anak berkebutuhan khusus secara merata dan berkualitas dengan memperhatikan keragaman kebutuhan mereka. Demikian juga, bila dibandingkan dengan negara-negara Cina, Filipina, dan Malaysia, layanan PAUD di Indonesia masih lebih rendah (UNESCO, 2009).

Efektivitas dan efisiensi pembelajaran untuk mengembangkan kemampuan kognitif terus mengalami kemajuan yang terlihat dari peningkatan hasil ujian nasional (UN) pada jenjang SMP dan jenjang pendidikan menengah. Di samping itu, meskipun mengalami kenaikan secara konsisten, nilai rata-rata UN pada jenjang pendidikan menengah sangat bervariasi terhadap lokasi dan jenis sekolah, dengan kisaran antara 5,81 di daerah tertinggal dan terpencil hingga 8,95 di daerah yang lebih maju pada



tahun 2007. Perbandingan kinerja antarsekolah, antarkabupaten, antarprovinsi dan nasional yang dibuat berdasarkan rata-rata nilai ujian nasional menunjukkan korelasi positif antara kondisi ekonomi dan nilai UN. Selain itu, tata kelola penyelenggaraan UN mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring serta evaluasi juga masih belum optimal.

Di samping itu, untuk mengukur kemampuan kognitif, Indonesia berpartisipasi dalam tiga ujian berstandar internasional, yaitu PISA (*Programme for International Student Assessment*), TIMSS (*Trend in International Mathematics and Science Study*) dan PIRLS (*the Progress in International Reading Literacy Study*). Ujian-ujian PISA dan TIMSS mengukur kemampuan di bidang matematika, IPA dan keterampilan keberaksaraan di SMP, sementara PIRLS menilai keberaksaraan di Kelas 4 SD. Dalam kurun 2000–2006 telah terjadi kemajuan pada capaian nilai PISA untuk matematika dan keberaksaraan, meski perbaikan baru terjadi di perkotaan dan secara umum masih menempatkan Indonesia pada kuintil terbawah di antara negara-negara berkembang, di bawah Malaysia dan Thailand, Korea, dan Singapura. Hasil TIMSS terbaru menunjukkan siswa Indonesia yang mencapai standar TIMSS di bidang IPA dan matematika kurang dari 1 persen.

Pembangunan pendidikan belum sepenuhnya mampu menumbuhkan jiwa, sikap, serta kemampuan berpikir analitis, berkomunikasi efektif, bekerjasama dalam tim, dan kewirausahaan. Dalam konteks tantangan pembangunan nasional di bidang ekonomi dan kesejahteraan sosial, ukuran kualitas dan relevansi pendidikan cenderung didominasi oleh indikator-indikator terkait kesiapan lulusan untuk bekerja (*employability*) serta kecocokan keterampilan yang dimiliki dengan kebutuhan di dunia usaha dan industri. Karakteristik lulusan terkait dengan strategi kebudayaan dan pembangunan nasional dalam lingkup yang lebih luas, termasuk pembangunan karakter bangsa seringkali terpinggirkan oleh kepentingan yang lebih pragmatis terkait dengan pekerjaan dan lapangan kerja.

Pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah, *soft skills* yang harus dimiliki siswa dan lulusan meliputi keterampilan komunikasi, interaksi sosial, pemecahan masalah, serta sikap dan keinginan berkembang dan menguasai pengetahuan lain dari yang dimilikinya. Di samping itu, mengingat tidak semua anak didik akan memiliki kesempatan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang paling tinggi, pada jenjang pendidikan dasar, pendidikan karakter bangsa harus dimantapkan sejalan dengan pendidikan agama, akhlak mulia, dan kewarganegaraan. Pada jenjang pendidikan tinggi, *soft skills* tersebut perlu diperkuat dengan kemampuan komunikasi pada tingkat yang lebih tinggi, kemampuan berargumentasi, kepemimpinan kelompok, membangun komunikasi dan jaringan dengan orang yang memiliki latar belakang beragam, memotivasi orang lain, sehingga pada tataran ini lulusan sudah memiliki etos kerja yang tinggi (*high work ethics*) serta kemampuan beradaptasi.

Pembangunan bidang pendidikan juga perlu melakukan pembaruan pada

pendidikan karakter bangsa. Walaupun pembaruan sangat dibutuhkan pada tingkat pendidikan tinggi, penyesuaian perlu juga dilakukan pada pendidikan dasar dan menengah. Pendidikan sosiologi, sejarah, kewarganegaraan, dan antropologi perlu dirancang secara komprehensif terutama dalam metode penyajian dan penyampaianya, agar peserta didik memiliki kemampuan untuk hidup dalam masyarakat global yang inklusif dan beragam.

Standar isi dan proses pendidikan sudah sesuai dengan definisi pendidikan bermutu yang mencakup prinsip tumbuh kembang anak secara holistik dengan memenuhi perbedaan individual, mendorong partisipasi aktif, dan mendukung perkembangan karakter peserta didik. Namun, di dalam pelaksanaannya, standar isi dan proses tersebut sangat terfokus pada prestasi kognitif dalam arti sempit. Di samping itu, iklim sekolah dan suasana pembelajaran yang didominasi oleh cara belajar dan praktik pengajaran menghafal (*rote learning*) dan ujian yang dilakukan dengan menggunakan pilihan ganda (*multiple choice tests*) tidak kondusif untuk pengembangan *soft skills*. Oleh karena itu, proses pembelajaran yang dikembangkan perlu diarahkan pada proses pembelajaran yang interaktif sehingga siswa dan kelompok siswa bekerja sama secara aktif dan proaktif dalam pembelajaran, yang didalamnya guru menunjukkan kematangan, keluwesan dan kreativitas. Untuk mengembangkan kualitas siswa seperti tersebut di atas, dibutuhkan guru-guru kreatif yang mampu berinteraksi lebih banyak dengan para siswa, dan lebih menjadi fasilitator pembelajaran daripada sebagai sumber informasi tunggal. Untuk itu, budaya atau kebiasaan yang menghargai berbagai bentuk pembelajaran dan pencapaian prestasi perlu dikembangkan dan memandang ujian sebagai salah satu bagian dari budaya tersebut.

Menciptakan iklim sekolah yang mendukung nilai-nilai inti membutuhkan sikap saling menghargai antaranggota komunitas sekolah, struktur yang memberi kesempatan untuk mengemukakan dan mendengar pendapat orang lain, dan kegiatan-kegiatan yang mengajarkan kemampuan kepemimpinan siswa. Adanya kebutuhan untuk mematuhi peraturan dan regulasi di bawah sistem yang berlaku menghambat penciptaan iklim tersebut. Untuk itu, perbaikan iklim sekolah perlu dilakukan, antara lain, melalui penerapan prinsip-prinsip kepemimpinan, pengambilan keputusan yang bersifat partisipatif, dan tanggung jawab bersama serta dukungan peraturan dan perundangan. Sekolah membutuhkan dukungan untuk mengembangkan dan mengimplementasikan kegiatan-kegiatan yang melibatkan sekolah dan komunitas serta yang menciptakan kebudayaan sekolah positif.

Sementara itu, meningkatnya partisipasi pendidikan belum sepenuhnya diikuti dengan peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan seperti yang diharapkan. Perubahan struktur ekonomi yang lebih banyak didukung oleh sektor modern yang menuntut dukungan tenaga kerja dengan keterampilan lebih tinggi. Perluasan kesempatan pendidikan dan peningkatan partisipasi pendidikan selama ini belum sepenuhnya berhasil memperbaiki tingkat keterampilan tenaga kerja dengan cukup cepat untuk dapat menjawab kebutuhan tenaga kerja yang lebih terampil dalam rangka

menopang pertumbuhan dan perubahan struktur ekonomi. Tingkat kebekerjaan lulusan jenjang pendidikan menengah antara lain dapat dilihat dari tingkat pengangguran lulusan dan tingkat upah. Lulusan SMK (usia 18–20 tahun) yang masuk ke dalam angkatan kerja sekitar 80,7 persen, sedangkan lulusan SMA pada kelompok usia yang sama hanya sekitar 54,5 persen (Sakernas 2007). Proporsi lulusan jenjang pendidikan menengah, baik SMA maupun SMK, yang berada di pasar kerja dan belum mendapatkan pekerjaan dalam kurun dua tahun setelah lulus masih cukup tinggi. Proporsi mereka yang belum memperoleh pekerjaan setelah dua tahun lulus sekolah tidak menunjukkan perbedaan signifikan antara kedua jalur tersebut. Secara umum, tingkat kebekerjaan keduanya terus mengalami kenaikan seiring dengan meningkatnya umur lulusan. Perbedaan kinerja kebekerjaan lulusan SMA dan SMK tidak terlalu signifikan. Namun, dalam konteks pengupahan, studi LD UI 2009 menunjukkan perbedaan upah (*earning*) antara kedua lulusan, yang menyatakan lulusan SMK menikmati upah yang lebih tinggi dibandingkan lulusan SMA. Hal ini terlihat pada tahun 2007 rasio upah SMK terhadap SMA sekitar 1,7 untuk jenis pekerjaan non-profesional dan non-manajerial serta sekitar 1,4 untuk jenis pekerjaan profesional dan manajerial. Rasio upah tersebut menunjukkan kecenderungan adanya peningkatan bila dibandingkan dengan tahun 2002, yaitu masing-masing sekitar 1,09 untuk jenis pekerjaan non-profesional dan non-manajerial, serta sekitar 1,1 untuk jenis pekerjaan profesional dan manajerial. Namun, pengalaman internasional dan hasil penelitian (*Studi Education Sector Assesment*, Chen 2009) menunjukkan bahwa tingkat kebekerjaan lulusan SMK lebih tinggi daripada lulusan SMA, meskipun dalam hal pengupahan lulusan SMK lebih rendah daripada SMA.

Selanjutnya, angka partisipasi jenjang pendidikan tinggi yang terus meningkat dari tahun ke tahun masih belum sepenuhnya mampu menghasilkan lulusan dengan kualitas dan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan. Pada tingkat mahasiswa, pencapaian Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) merupakan indikator kualitas hasil pembelajaran. Indikator ini hanya dapat digunakan sebagai alat ukur di tingkat perguruan tinggi yang bersangkutan dan tidak dapat digunakan untuk perbandingan kualitas hasil pembelajaran antar Perguruan Tinggi. Selanjutnya, ditinjau dari kualitas dan daya saing institusinya, beberapa PT telah masuk dalam peringkat 500 besar versi *Times Higher Education* (THE), yaitu: UI, ITB, UGM, dan UNAIR. Jumlah PT kelas dunia versi THE tersebut akan bertambah menjadi tujuh PT peringkat 600 besar, yaitu: UI, ITB, UGM, UNAIR, IPB, UNDIP dan UNIBRAW (THE QS, 2009). Dengan demikian, upaya meningkatkan kualitas PT perlu memperkuat standarisasi penilaian prestasi mahasiswa dan mendorong lebih banyak lagi jumlah PT yang masuk kelas dunia (*world class university*) sehingga memiliki daya dorong yang lebih signifikan terhadap daya saing bangsa. Meskipun secara nasional pencapaian APK PT pada tahun 2008 telah mencapai 17,75 persen, jika dipilah antarprovinsi pencapaian APK PT tersebut sangat bervariasi. APK PT terendah adalah Sulawesi Barat sebesar 4,98 persen dan Kalimantan Tengah sebesar 6,85 persen dengan sedikit lembaga perguruan tinggi, sedangkan APK PT tertinggi adalah Provinsi DI Yogyakarta yang mencapai 66,74 persen dan Provinsi DKI Jakarta sebesar 57,63 persen dengan jumlah lembaga perguruan tinggi yang banyak

(Depdiknas 2008). Hal ini mengindikasikan adanya masalah distribusi ketersediaan lembaga perguruan tinggi. Selain itu, angka transisi dari sekolah menengah ke perguruan tinggi baru mencapai 43,4 persen. Angka partisipasi pendidikan dan angka transisi tersebut lebih rendah jika dibandingkan dengan negara-negara berkembang lainnya di Asia Tenggara.

Peran perguruan tinggi swasta sangat signifikan yang berjumlah lebih dari 2.800 PT dengan 78 persen dari jumlah total mahasiswa sebanyak 4,37 juta (2008). Adapun perguruan tinggi negeri jumlahnya hanya 82 dengan jumlah mahasiswa sebanyak 978 ribu orang atau 22 persen dari seluruh mahasiswa yang ada. Namun, dilihat dari aspek kualitas, perguruan tinggi swasta memiliki variasi yang sangat beragam yang memerlukan perhatian yang lebih agar kuantitas mahasiswa yang besar tersebut juga didukung oleh pendidikan yang berkualitas. Beragamnya kualitas lulusan dan terbatasnya lapangan kerja yang tersedia berdampak pada meningkatnya jumlah sarjana pencari kerja atau menganggur yang pada gilirannya berpotensi menimbulkan dampak sosial politik. Di samping kualitas, pendidikan tinggi masih menghadapi kendala rendahnya kualitas penelitian. Sehubungan dengan hal tersebut, partisipasi sektor industri dan lembaga pemerintah lain di sektor produktif perlu untuk terus ditingkatkan melalui penggalangan berbagai kerjasama penelitian, baik dengan institusi litbang, dunia industri, maupun pemerintah daerah. Dalam hal pendanaan penelitian, kerjasama PT dengan industri, institusi litbang, dan pemerintah daerah akan memperkuat pembiayaan penelitian sehingga hasilnya lebih bermanfaat bagi para pihak yang bekerja sama dan masyarakat luas. Sementara itu, persaingan global semakin menuntut hasil nyata dari perguruan tinggi. Dengan kemampuan pembiayaan yang terbatas, diperlukan komitmen politik untuk memilih fokus, baik dalam memilih bidang maupun institusi unggulan yang akan dikembangkan.

Kualitas dan relevansi pendidikan yang baik akan menghasilkan daya saing yang tinggi. Beberapa indikator penting mengenai potensi daya saing tinggi meliputi struktur tenaga kerja yang didominasi oleh tenaga terdidik dan terampil yang memiliki *soft skills* dengan kemampuan mengelola sumberdaya serta memiliki orientasi melayani yang tinggi, serta penguasaan bahasa yang baik termasuk bahasa Inggris dan bahasa internasional lainnya. Perkembangan iptek yang makin cepat serta peranan teknologi informasi dan komunikasi yang tinggi, mengharuskan *soft skills* memiliki kandungan tinggi dalam hal penguasaan teknologi informasi dan komunikasi yang tinggi, serta keterampilan manajemen pengetahuan yang baik.

Faktor penting lainnya yang mempengaruhi daya saing adalah struktur pendidikan dan keterampilan tenaga kerja. Struktur pendidikan tenaga kerja telah mengalami perubahan dalam beberapa tahun terakhir, dan pertumbuhan proporsi tenaga kerja terdidik masih dirasakan lambat dalam mengantisipasi dan merespons kebutuhan tenaga terampil. Persentase tenaga kerja yang menyelesaikan sekolah menengah meningkat dari 13 persen menjadi 20 persen antara tahun 2004 dan 2007. Proporsi tenaga kerja berpendidikan diploma atau sarjana meningkat dari 5,3 persen



menjadi 6,2 persen, sedangkan proporsi lulusan SD atau lebih rendah turun dari 54 persen menjadi 52 persen dalam kurun waktu yang sama. Proporsi tenaga kerja lulusan pendidikan dasar sembilan tahun meningkat setidaknya sebesar 0,3 persen. Pada tahun 2007 terdapat 52 persen tenaga kerja berpendidikan SD atau tidak tamat SD, 21 persen berpendidikan SMP, 21 persen pendidikan menengah, 3 persen berpendidikan diploma, dan 4 persen berpendidikan sarjana atau lebih tinggi (LD UI, 2009).

Indikator penting lainnya dalam meningkatkan kualitas pendidikan adalah tingkat pemahaman dan pengamalan ajaran agama di kalangan peserta didik. Tingkat pemahaman dan pengamalan agama di kalangan peserta didik masih belum berkembang seperti yang diharapkan. Nilai-nilai agama belum menjadi landasan moral, etika, dan perilaku keseharian. Masih terjadinya perkelahian antarpelajar, penyalahgunaan narkoba, dan kenakalan remaja lainnya merupakan fenomena terjadinya kekurangpahaman dan kesenjangan antara tingkat pemahaman dan pengamalan nilai-nilai agama. Minat siswa dalam mendalami pendidikan agama juga cenderung masih rendah yang ditunjukkan oleh adanya pandangan sebagian siswa bahwa mata pelajaran agama tidak terlalu penting dalam menentukan kelulusan siswa karena mata pelajaran itu tidak diujikan secara nasional.

Selain itu, penyelenggaraan pendidikan agama sampai sejauh ini belum dapat seluruhnya mengembangkan pribadi dan akhlak mulia peserta didik. Hal ini terjadi, antara lain, karena belum optimalnya pengembangan kurikulum, metodologi dan teknologi pembelajaran pendidikan agama, rasio guru-murid yang masih tinggi, dan masih rendahnya proporsi guru agama yang memenuhi persyaratan kualifikasi akademik dan kompetensi seperti yang ditetapkan dalam peraturan dan perundangan. Masih rendahnya tingkat kualifikasi guru agama ini bisa dilihat dari data tahun 2007 – 2008. Jumlah guru Pendidikan Agama Islam (PAI) sebanyak 168.184 orang. Dari jumlah tersebut sebanyak 4,04 persennya berpendidikan D1, 50,09 persen berpendidikan D2, dan 13,08 persen berpendidikan D3. Dengan kata lain, terdapat sekitar dua-pertiga guru PAI masih belum memenuhi kualifikasi akademik minimal D4/S1. Di samping itu, dari aspek tenaga kependidikan, kondisi pengawas pendidikan agama juga masih belum memadai. Saat ini terdapat sekitar 8 ribu orang pengawas pendidikan agama yang melayani pengawasan lebih dari 240 ribu satuan pendidikan atau seorang pengawas pendidikan agama mengawasi dan membina rata-rata 30 sekolah. Sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah, kualifikasi minimal pengawas untuk satuan pendidikan TK/SD adalah S1, sedangkan untuk pengawas satuan pendidikan SMP/SMA/SMK adalah S2. Dari sekitar 8 ribu pengawas pendidikan agama, hanya sekitar 3.500 orang yang memiliki kualifikasi D4/S1 dan sekitar 1.000 orang yang memiliki kualifikasi S2.

Dalam hal pengembangan metode pembelajaran, kemampuan para guru agama pada saat ini pada umumnya masih menggunakan metode-metode pembelajaran konvensional, kurang inovatif dan kurang membangkitkan minat siswa untuk memahami dan mendalami agama. Di samping masih rendahnya kualifikasi guru agama pada umumnya, masih rendahnya kompetensi guru agama dalam penguasaan atau

penggunaan teknologi modern juga menjadi salah satu penyebabnya. Kualitas kurikulum pembelajaran agama juga cenderung masih sulit untuk diukur tingkat pencapaiannya. Karena itu, diperlukan upaya-upaya serius untuk mengembangkan kompetensi guru agama pada penguasaan teknologi informasi agar kemampuan guru dalam proses pembelajaran lebih variatif, inovatif, dan menarik.

Sarana, prasarana, dan sumber belajar pendidikan agama juga masih belum memadai. Prasyarat setiap sekolah harus memiliki tempat praktik pendidikan ibadah masih belum bisa dipenuhi oleh sejumlah besar sekolah. Kepustakaan pendidikan agama yang seharusnya menjadi sumber belajar guru agama dan peserta didik sebagai rujukan dan pengembangan wawasan keagamaan juga belum dapat dipenuhi oleh satuan pendidikan. Sumber belajar dan rujukan penting agama seperti kitab suci, tafsir kitab suci dan hadis sabda Nabi, dan referensi hadis keagamaan hasil karya para tokoh besar agama dan karya cerita-cerita atau novel yang bernuansa religius sangat langka ditemui pada sekolah-sekolah. Buku-buku agama yang bisa dijumpai di sekolah pada umumnya hanya terbatas pada buku pegangan guru atau buku-buku teks siswa yang jumlahnya juga sangat terbatas. Demikian juga, sumber belajar agama yang menarik dan berbasis teknologi tinggi, seperti alat peraga, multimedia, dan audio visual, juga masih sangat susah ditemukan di sekolah. Sementara itu, untuk kaderisasi ahli-ahli agama dilakukan melalui pendidikan keagamaan.

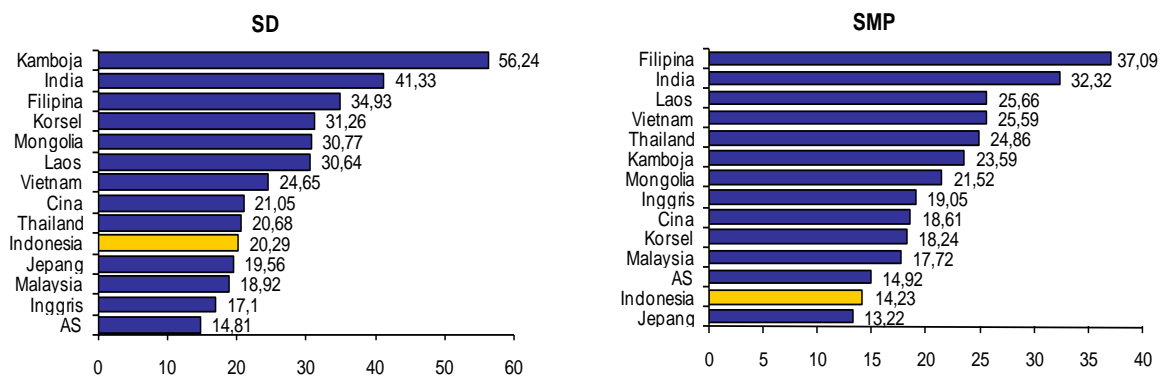
Dengan mengacu pada uraian di atas, tantangan yang dihadapi dalam meningkatkan kualitas, relevansi, dan daya saing pendidikan mencakup upaya meningkatkan kesiapan anak bersekolah; meningkatkan kemampuan kognitif lulusan; meningkatkan karakter dan soft-skill lulusan; meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan menengah; meningkatkan kualitas, relevansi, dan daya saing pendidikan tinggi; meningkatkan kualitas penelitian di pendidikan tinggi; dan meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan agama dan pendidikan keagamaan.

Profesionalisme guru masih rendah dan distribusinya belum merata. Proporsi guru yang memenuhi kualifikasi akademik terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2008, proporsi guru yang memenuhi kualifikasi akademik minimal S1/D4 mencapai sekitar 47,04 persen, sementara guru yang sudah tersertifikasi sebanyak 15,09 persen. Namun demikian, pencapaian ini masih jauh dari yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen. Selain itu, pemanfaatan guru belum sepenuhnya optimal yang diakibatkan, antara lain, oleh distribusi guru yang masih belum merata. Distribusi yang tidak merata berdampak pada terjadinya inefisiensi penyediaan guru yang tercermin dari kecilnya rasio murid dan guru di Indonesia pada jenjang sekolah dasar, yaitu 20 orang murid untuk 1 orang guru, lebih kecil dari Cina, Thailand, Filipina, dan Korea Selatan. Pada jenjang pendidikan SMP rasio murid dan guru semakin kecil, yaitu 14 orang murid untuk 1 orang guru atau lebih kecil bila dibandingkan dengan Amerika Serikat, Malaysia, Korea Selatan dan Thailand. Rasio yang kecil tersebut berimplikasi pada rendahnya beban mengajar guru sehingga hanya 44 persen saja guru mencapai batas minimal waktu mengajar, yaitu

lebih dari 24 jam per minggu (Gambar 2.10).

Selain itu, distribusi guru juga tidak merata. Satuan pendidikan di daerah perkotaan mengalami kelebihan guru, tetapi satuan pendidikan di daerah terpencil banyak mengalami kekurangan guru. Distribusi yang tidak merata berakibat pada bervariasinya beban mengajar guru di daerah perkotaan, perdesaan dan daerah terpencil. Pada jenjang SD, rata-rata waktu mengajar guru di daerah tertinggal mencapai 29,0 jam per minggu. Di daerah perkotaan dan perdesaan rata-rata beban mengajar guru tidak jauh berbeda yaitu 24,9 jam per minggu di perkotaan dan 23,9 jam per minggu di perdesaan. Ketimpangan rata-rata beban mengajar pada jenjang SMP berbeda dengan jenjang SD, yaitu 18,0 jam per minggu di perkotaan, 16,4 jam per minggu di perdesaan dan 15,9 jam per minggu di daerah tertinggal. Berdasarkan kondisi di atas, pada jenjang SD, penempatan dan penugasan guru juga harus memperhatikan kebutuhan guru di daerah terpencil, perbatasan, dan daerah kepulauan yang selama ini masih kekurangan guru terutama untuk mata pelajaran tertentu. Berdasarkan uraian di atas, *tantangan yang dihadapi adalah meningkatkan pemerataan distribusi, kualifikasi akademik, dan profesionalisme guru.*

GAMBAR 2.10
PERBANDINGAN JUMLAH MURID YANG DIAJAR OLEH SEORANG GURU
DI BEBERAPA NEGARA



Sumber: Depdiknas, Bappenas, dan Bank Dunia, 2009

Ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan yang berkualitas masih terbatas. Kegiatan rehabilitasi ruang kelas SD/MI telah dilaksanakan mulai tahun 2005 sampai dengan tahun 2009. Namun, rehabilitasi ruang kelas SD/MI dan SMP/MTs masih belum dapat dituntaskan. Kondisi ini ditunjukkan, antara lain, masih ditemukannya ruang-ruang kelas SD/MI yang rusak, terutama di daerah terpencil, terisolir, kepulauan, dan perbatasan. Pada jenjang SMP/MTs, jumlah sekolah/madrasah meningkat dari 37.305 pada tahun ajaran 2006/2007 menjadi 39.110 pada tahun 2007/2008, yang terdiri dari 26.277 SMP dan 12.883 MTs. Namun, tidak seluruh ruang kelas dalam kondisi layak untuk digunakan. Sekitar 79,9 persen ruang kelas SMP dalam keadaan

baik, 14,3 persen rusak ringan, dan 5,8 persen rusak berat. Pada jenjang pendidikan menengah, jumlah sekolah pada tahun 2007/2008 mencapai 16.985 sekolah yang mencakup SMA dan SMK yaitu masing-masing 10.239 dan 6.746 sekolah. Dilihat dari kondisi bangunan sekolah, persentase ruang kelas dalam kondisi baik sudah cukup besar (89,9 persen) tetapi masih ada ruang kelas dalam kondisi rusak ringan dan rusak berat masing-masing 7,4 persen dan 2,7 persen.

Selain itu, sampai saat ini belum semua sekolah mampu menyediakan buku mata pelajaran yang dibutuhkan bagi peserta didik. Ada kecenderungan institusi pendidikan mengganti buku mata pelajaran untuk setiap tahun ajaran. Hal ini semakin memberatkan orangtua, terutama orangtua siswa miskin, dan menyebabkan inefisiensi penyediaan buku-buku di perpustakaan. Di samping itu, belum seluruh SD/MI dan SMP/MTs memiliki perpustakaan yang memadai, baik ruangan maupun koleksi buku-bukunya. Pada tahun 2008, diperkirakan proporsi SD dan SMP yang memiliki perpustakaan masing-masing baru mencapai sekitar 32 persen dan 63 persen. Sementara itu, proporsi SMP yang memiliki laboratorium IPA dan laboratorium komputer masing-masing sekitar 71 persen dan 48 persen. Pada jenjang pendidikan menengah, baru sekitar 80 persen SMA negeri dan 60 persen SMA swasta, serta 90 persen sekolah kejuruan yang sudah memiliki perpustakaan. Sementara itu, belum semua SMA memiliki laboratorium lengkap sebagai penunjang proses pembelajaran. Baru sekitar 80 persen SMA negeri mempunyai laboratorium IPA lengkap (biologi, fisika, dan kimia) dan 55 persen SMA swasta memiliki laboratorium IPA.

Pada tahun 2008, proporsi SD, SMP, dan SMK yang memiliki laboratorium multimedia mencapai sekitar 19 persen, 48 persen, dan 75 persen. Laboratorium multimedia juga ditemukan pada 80 persen SMA negeri dan 50 persen SMA swasta. Walaupun demikian, peningkatan proporsi kepemilikan TIK belum diikuti dengan tingkat pemanfaatan yang baik oleh institusi pendidikan.

Ditetapkannya Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan menunjukkan semakin pentingnya peran perpustakaan dalam mentransformasikan ilmu pengetahuan secara demokratis menuju masyarakat yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan nasional di samping sebagai pelestari nilai budaya (*culture building*) di masyarakat. Meskipun pembangunan perpustakaan sudah mengalami berbagai kemajuan, masih terdapat permasalahan dan tantangan yang dihadapi, antara lain: (1) budaya baca masyarakat masih tergolong rendah karena budaya lisan masih mendominasi di masyarakat; (2) jumlah dan jenis perpustakaan terutama perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah, dan perpustakaan rumah ibadah masih terbatas; (3) rasio jumlah bahan bacaan masyarakat dengan pertumbuhan jumlah pemustaka masih relatif rendah, kondisi ini ditunjukkan oleh jumlah produksi buku nasional yang diterbitkan rata-rata per tahun sekitar 6.000 judul; (4) pelestarian fisik dan isi khasanah budaya nusantara belum optimal; dan (5) tenaga



pengelola perpustakaan yang terbatas, baik jumlah, persebaran maupun kompetensinya.

Dengan merujuk paparan tersebut, *tantangan yang dihadapi untuk meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana yang berkualitas meliputi percepatan penuntasan rehabilitasi gedung sekolah yang rusak; peningkatan ketersediaan buku mata pelajaran; peningkatan ketersediaan dan kualitas laboratorium dan perpustakaan; dan peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK); serta peningkatan akses dan kualitas layanan perpustakaan.*

Manajemen dan tatakelola pendidikan belum efektif. Manajemen dan tata kelola pendidikan belum berjalan optimal dan pengambilan keputusan belum banyak memanfaatkan data dan informasi. Pengambilan kebijakan pembangunan pendidikan masih belum sepenuhnya didukung oleh sistem informasi, kualitas dan validitas data, dan kondisi empiris di lapangan (*evidence-based decision making*). Berbagai permasalahan baik menyangkut tatakelola, utamanya mekanisme pengambilan keputusan maupun ketersediaan serta konsistensi dan validitas data sering dikeluhkan sebagai penyebab utama.

Pemerintah baik pusat maupun daerah masih mengalami kendala kapasitas untuk melaksanakan tugas dan peran baru seiring dengan pelaksanaan desentralisasi pendidikan. Proses transisi menuju desentralisasi masih belum terprogram secara sistematis sehingga tidak terdapat acuan untuk melakukan evaluasi dan *benchmarking* terhadap kemajuan-kemajuan yang dicapai oleh lembaga-lembaga pemerintah baik di jenjang pusat, provinsi, maupun kabupaten kota.

Upaya meningkatkan otonomi perguruan tinggi utamanya ditempuh melalui pemberian status badan hukum bagi perguruan tinggi. Implementasi pilot di empat perguruan tinggi negeri: UI, UGM, ITB, dan IPB telah berlangsung selama hampir sembilan tahun. Tiga perguruan tinggi negeri lainnya: UPI, USU, dan UNAIR menyusul belum lama. Perubahan status tampak membawa perubahan atmosfer yang berbeda di perguruan tinggi terkait, meskipun masih terdapat beberapa permasalahan, di antaranya, belum selarasnya upaya reformasi pengelolaan pendidikan dengan reformasi di bidang pengelolaan keuangan negara.

Kemitraan publik dan swasta dalam penyelenggaraan pendidikan belum berkembang seperti yang diharapkan. Kemitraan publik dan swasta dalam penyelenggaraan pendidikan telah berjalan cukup baik apabila diukur dengan proporsi sekolah dan perguruan tinggi swasta. Akan tetapi, bila diteliti lebih cermat, masih banyak permasalahan yang belum diatasi dengan baik, misalnya belum terpenuhinya prinsip *non-profit* dalam penyelenggaraan layanan pendidikan oleh swasta. Kemitraan juga terlihat belum berkembang optimal ketika diukur dengan pemerataan akses terhadap pendidikan berkualitas. Kemitraan belum efektif menangani mereka yang terpinggirkan dan belum terlayani. Penduduk marginal cenderung mendapat pelayanan pendidikan marginal dari masyarakat/swasta dan belum dapat mengakses sumberdaya

publik secara maksimal. Dengan demikian, *tantangan yang dihadapi untuk meningkatkan manajemen dan tatakelola pendidikan meliputi upaya untuk meningkatkan manajemen, tatakelola, dan kapasitas lembaga; mendorong otonomi perguruan tinggi; dan meningkatkan kemitraan publik dan swasta.*

Pembiayaan pendidikan yang berkeadilan belum terwujud. Mekanisme alokasi dan penyaluran dana pendidikan sangat kompleks dan perlu penyederhanaan dalam rangka mendukung efisiensi alokasi dan akuntabilitas yang lebih baik. Kebutuhan yang terus meningkat dan keterbatasan sumberdaya menuntut peningkatan efisiensi alokasi pada tahap perencanaan dan penganggaran di samping efisiensi teknis dalam pelaksanaan anggaran. Untuk itu, diperlukan upaya untuk terus menyelaraskan mekanisme penyaluran sumberdaya yang langsung dari pusat ke tingkat sekolah. Intervensi kebijakan yang dibiayai melalui berbagai sumber perlu diselenggarakan secara harmonis dan transparan agar tidak menimbulkan fragmentasi strategi kebijakan, pendanaan dan manajemen ganda, serta mengganggu perencanaan dan operasi di tingkat kabupaten/kota. Di samping itu, perlu dijaga agar kebijakan yang disertai pendanaan dari pusat tidak mengakibatkan efek substitutif sebagaimana pengalaman implementasi Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang memperlihatkan bahwa beberapa pemerintah daerah menghentikan alokasi dana operasional ke sekolah setelah menerima BOS.

Seiring dengan demokratisasi yang terjadi, penyelenggaraan pendidikan dasar tanpa dipungut biaya kini mulai banyak dilakukan di banyak daerah dengan pendekatan yang sangat bervariasi dan belum didukung kerangka konseptual yang utuh serta belum disertai mekanisme peningkatan kualitas yang sistematis. Di banyak tempat, upaya penggratisan sekolah lebih didorong oleh motivasi politik, tanpa didasari kerangka konseptual yang kuat untuk mewujudkan keadilan pendanaan serta meningkatkan kualitas pendidikan secara sistematis dan berencana. Di banyak daerah dan sekolah, penghapusan SPP terjadi seiring dengan membesarnya dana BOS dan tambahan bantuan operasional dari pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Untuk menjamin kualitas pendidikan, penyelenggaraan pendidikan gratis harus tetap mengacu dan memenuhi komponen standar nasional pendidikan (SNP) yang meliputi input, proses, output, dan outcome proses pembelajaran. Selanjutnya, mengingat dana BOS yang belum sepenuhnya mencukupi kebutuhan dana untuk melaksanakan semua ketentuan dalam SNP, maka perlu diidentifikasi elemen-elemen dalam SNP yang disepakati paling efektif berpengaruh pada peningkatan kualitas. Dengan merujuk pada SNP, semua sekolah baik negeri maupun swasta, tanpa kecuali harus melaksanakan ketentuan-ketentuan yang terkandung dalam kelompok standar yang menjadi prioritas tersebut sebelum melaksanakan lainnya. Karena sifatnya wajib dan harus dipenuhi oleh semua sekolah tanpa kecuali, ketentuan tersebut kemudian disebut Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan Dasar. Di samping itu, pada tingkat sekolah SPM sekaligus menjadi pedoman untuk melakukan perencanaan dan penganggaran karena memuat ketentuan-ketentuan yang harus diprioritaskan oleh sekolah untuk dipenuhi. Selanjutnya, sekolah



yang sudah melebihi ketentuan dan sudah melaksanakan semua SPM tetap didorong untuk maju dan mengadopsi input-input dan proses-proses lainnya yang mampu meningkatkan kualitas pembelajarannya. Berdasarkan paparan tersebut di atas, *tantangan yang dihadapi dalam lima tahun mendatang untuk mewujudkan pembiayaan pendidikan yang berkeadilan adalah mewujudkan alokasi dan mekanisme penyaluran dana yang efisien, efektif, dan akuntabel, serta menyelenggarakan pendidikan dasar bermutu yang terjangkau bagi semua.*

2.2.1.4 Partisipasi Pemuda, Budaya dan Prestasi Olahraga yang Rendah

Partisipasi dan peran aktif pemuda masih rendah. Pemuda memiliki peran penting sebagai aset dan penerus pembangunan bangsa. Beberapa permasalahan yang masih dihadapi dalam pembangunan pemuda, antara lain: (1) rendahnya kualitas pemuda yang ditandai oleh angka partisipasi pemuda dalam pendidikan; data Susenas 2007 menunjukkan sekitar 1,74 persen jumlah pemuda belum/tidak pernah sekolah, 6,94 persen masih/sedang bersekolah, dan 91,32 persen sudah tidak bersekolah lagi; berdasarkan tingkat kelulusan pemuda: 7,15 persen lulus perguruan tinggi, 31,81 persen lulus SMA, 24,02 persen lulus SMP, 29,20 persen lulus SD, dan 7,80 persen tidak memiliki ijazah dan belum tamat SD; (2) terjadinya masalah-masalah sosial di kalangan pemuda, seperti kriminalitas, premanisme, penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif (NAPZA), serta penularan HIV dan AIDS; (3) tingginya tingkat pengangguran terbuka (TPT) pemuda; data Sakernas 2008 menunjukkan, TPT pemuda sebesar 14,35 persen. *Dengan demikian, tantangan ke depan adalah peningkatan kualitas pemuda dalam rangka meningkatkan peran aktif pemuda di berbagai bidang pembangunan.*

Prestasi dan budaya olahraga masih rendah. Budaya dan prestasi olahraga sudah mengalami kemajuan namun masih perlu ditingkatkan. Data Susenas 2006 menunjukkan, persentase penduduk berumur 10 tahun ke atas yang melakukan kegiatan olahraga sendiri menurun dari 30,6 persen pada tahun 2003 menjadi 26,9 persen pada tahun 2006. Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam upaya peningkatan budaya dan prestasi olahraga, antara lain: (1) terbatasnya prasarana dan sarana olahraga masyarakat; berdasarkan data BPS 2008, lapangan olahraga yang paling banyak tersedia adalah lapangan bola voli di 58,8 ribu desa, lapangan sepak bola di 42,3 ribu desa, dan lapangan bulutangkis di 37,2 ribu desa, sedangkan lapangan olahraga yang paling sedikit ketersediaannya adalah kolam renang di 1,9 ribu desa, lapangan tennis di 3,8 ribu desa, dan lapangan bola basket di 5,3 ribu desa (Podes 2008); (2) terbatasnya upaya pembibitan atlet unggulan; (3) belum optimalnya penerapan teknologi olahraga dan kesehatan olahraga dalam rangka peningkatan prestasi; (4) terbatasnya jumlah dan kualitas tenaga dan pembina keolahragaan; (5) rendahnya apresiasi dan penghargaan bagi olahragawan dan tenaga keolahragaan yang berprestasi; dan (6) belum optimalnya sistem manajemen keolahragaan nasional. *Dengan demikian, tantangan ke depan adalah peningkatan pembinaan dan pengembangan olahraga yang*

didukung oleh prasarana dan sarana olahraga, serta penerapan teknologi dan kesehatan olahraga dalam rangka meningkatkan budaya dan prestasi olahraga.

2.2.1.5 Kualitas Kehidupan Beragama yang Belum Optimal

Semangat keagamaan masyarakat dalam sikap dan perilaku sosial belum optimal. Agama sebagai sistem moral dan etika idealnya dapat menuntun masyarakat kepada kehidupan yang bermoral dan berbudi luhur. Semangat kehidupan keagamaan masyarakat menunjukkan perkembangan yang menggembirakan. Hasil survei yang dilakukan Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama pada tahun 2007 terhadap masyarakat Muslim di 13 provinsi, antara lain memperlihatkan bahwa tingkat ketaatan masyarakat Muslim dalam menjalankan berbagai aktivitas ibadah termasuk dalam kategori sangat tinggi. Sekitar 92,0 persen masyarakat mengatakan selalu/cukup sering menunaikan shalat lima waktu, 63,5 persen melaksanakan shalat secara berjamaah, 97,3 persen menjalankan puasa di bulan Ramadhan, dan 77,0 persen mengeluarkan zakat/infak. Sementara itu, data yang sama memperlihatkan bahwa tingkat rata-rata masyarakat yang cukup/sangat sering mendengarkan ceramah agama mencapai 85,2 persen, membaca buku agama 56,7 persen, membaca informasi keagamaan di media cetak 37,9 persen, menonton siaran keagamaan di televisi 65,9 persen, dan mendengarkan siaran keagamaan di radio 48,2 persen.

Namun, semangat keagamaan di masyarakat tersebut masih menunjukkan adanya kesenjangan keberagamaan. *Pertama*, ada kesenjangan antara nilai-nilai ajaran agama dan pemahaman para pemeluknya. Tingginya semangat keberagamaan masyarakat pada satu sisi belum diimbangi dengan pemahaman yang memadai pada sisi lain. *Kedua*, ada kesenjangan antara pengetahuan agama dan pengamalannya yang tercermin dalam sikap dan perilaku. *Ketiga*, agama sebagai daya tangkal terhadap kecenderungan manusia berperilaku menyimpang belum cukup optimal. Berkembangnya aliran sempalan dan berkembangnya ideologi-ideologi yang tidak sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa menunjukkan bahwa agama belum sepenuhnya mampu membangun kesadaran, menggugah nurani dan spiritual sikap individu dalam perilaku keseharian. *Keempat*, agama belum sepenuhnya menjadi motivasi dalam pembangunan nasional. Dengan demikian, *tantangan yang dihadapi adalah meningkatkan semangat keagamaan masyarakat dalam sikap dan perilaku sosial meliputi upaya peningkatan pengetahuan dan pemahaman nilai-nilai ajaran agama pada masyarakat sehingga menjadikan agama sebagai motivasi dalam pembangunan nasional.*

Harmonisasi sosial dan kerukunan di kalangan umat beragama belum terwujud. Kerukunan umat beragama merupakan pilar bagi terwujudnya kerukunan nasional. Kerukunan umat beragama juga merupakan modal sosial yang harus dijaga dan dikelola sebagai salah satu potensi dalam pembangunan bangsa. Masalah yang dihadapi adalah bahwa kehidupan harmonis di dalam masyarakat belum sepenuhnya dapat diwujudkan, antara lain akibat munculnya ketegangan sosial yang sering melahirkan konflik intern dan antarumat beragama. Konflik yang pada mulanya sebagai



dampak ketimpangan sosial dan ketidakadilan ekonomi seringkali memanfaatkan sentimen keagamaan. Sebagian konflik juga terjadi karena pendirian rumah ibadat yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, corak pemahaman keagamaan yang cenderung eksklusif dan radikal, dan rendahnya tingkat pendidikan masyarakat.

Penelitian Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama tahun 2008 terhadap surat kabar daerah selama periode 2004–2007 menunjukkan bahwa telah terjadi sebanyak 444 insiden konflik terkait isu keagamaan di 10 provinsi. Dari jumlah tersebut, sebanyak 368 (83 persen) insiden konflik berupa aksi damai, sedangkan 76 (17 persen) kasus lainnya berupa aksi kekerasan. Dalam periode yang sama, insiden kekerasan yang terkait isu keagamaan itu telah berdampak pada korban manusia sebanyak 233 orang (7 orang tewas, 178 orang luka, dan 48 orang mengungsi), serta kerusakan properti sedikitnya 104 bangunan (79 rumah, 11 rumah ibadat, dan 14 bangunan lainnya). Dari 76 insiden kekerasan yang terjadi, 41 insiden (53,9 persen) terkait dengan isu moral dan 21 insiden (27,6 persen) lainnya terkait dengan isu sektarian atau konflik intern-umat beragama. Adapun jumlah insiden yang terkait dengan isu komunal atau konflik antarumat beragama berjumlah 10 insiden (13,2 persen). Hal ini sejalan dengan hasil temuan dari studi Balitbang Departemen Agama (2008) yang memperlihatkan bahwa isu komunal (antar-umat beragama) lebih mendominasi konflik keagamaan di wilayah Indonesia Bagian Timur. Sementara itu, wilayah Indonesia bagian barat lebih banyak menghadapi insiden kekerasan terkait isu moral dan sektarian (intra-umat beragama). Bentuk kekerasan lain yang lebih ekstrem adalah serangan teror atau terorisme yang mengatasnamakan agama. Secara umum, pemerintah telah berhasil mengatasi berbagai aksi konflik, baik yang terjadi di daerah-daerah konflik seperti Poso dan Maluku, maupun lainnya. Seiring dengan itu, pemerintah telah berhasil mengungkap jaringan terorisme dan menangkap pelaku teror yang sebagian bahkan telah menjalani eksekusi mati, yang berdampak pada menurunnya tingkat aksi terorisme di Indonesia. Meskipun begitu, negara harus tetap memberikan perhatian serius terhadap kemungkinan munculnya aksi terorisme atas nama agama dalam berbagai modusnya. Hal ini memperlihatkan bahwa kampanye anti-terorisme dengan mengatasnamakan agama, mesti terus dilanjutkan sebagai bagian dari upaya mencegah terjadinya aksi-aksi serupa di masa mendatang.

Sejak dibentuknya Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) tahun 2006 di tingkat provinsi, dan di beberapa kabupaten/kota, serta di tingkat kecamatan, keharmonisan kehidupan umat beragama telah mulai tampak dan dirasakan hasilnya. Hal ini diperlihatkan dengan intensitas aktivitas keagamaan dan semangat kerjasama lintas agama. Akan tetapi, fakta tersebut tidak berarti telah menghapus seluruh persoalan yang muncul dalam hubungan umat beragama. Kerukunan atau keharmonisan hubungan umat beragama bukan sesuatu yang terjadi dengan sendirinya dan bukan pula sesuatu yang kebal (*immune*). Kondisi kerukunan dan keharmonisan umat beragama berjalan terus mengikuti gerak dinamika sosial, politik, ekonomi, dan globalisasi yang juga turut mewarnai pola kehidupan masyarakat. Terlebih lagi,

walaupun di seluruh tingkat provinsi sudah dibentuk FKUB, belum semuanya mempunyai sarana dan prasarana yang memadai. Demikian juga FKUB di tingkat kabupaten/kota dan kecamatan, sebagian besar masih belum terbentuk. Oleh karena itu, *tantangan ke depan adalah membentuk dan membangun FKUB di tingkat provinsi, kabupaten/kota, bahkan di tingkat kecamatan apabila diperlukan, serta meningkatkan efektivitas forum.*

Pelayanan kehidupan beragama masih terbatas. Upaya untuk memperbaiki pelayanan kehidupan beragama terus dilaksanakan dari waktu ke waktu. Namun, fasilitasi dan pelayanan terhadap kehidupan beragama juga masih belum optimal dalam melindungi dan memudahkan masyarakat untuk beribadah sesuai dengan agamanya dan kepercayaannya. Agama merupakan sistem keyakinan yang bersifat pribadi. Dalam hal ini, peran pemerintah adalah memberikan pelayanan dan fasilitasi kepada umat beragama dalam menjalankan aktivitas keagamaannya dengan mudah dan aman. Namun, peran ini masih belum optimal dijalankan. Paling tidak, ada dua aspek pelayanan yang perlu diperhatikan, antara lain terlihat pada masih kurangnya fasilitas keagamaan, khususnya di daerah terpencil dan daerah terkena bencana, sehingga masyarakat mengalami kesulitan dalam menjalankan ibadah. Demikian juga, masih ada suasana yang kurang kondusif bagi sebagian kalangan umat beragama dalam melaksanakan ajaran dan ritual keagamaannya. Namun, di daerah yang sudah memiliki fasilitas sarana dan prasarana beribadah yang memadai, pemanfaatannya belum optimal. Dalam hal ini, pemerintah perlu mengarahkan dan mendukung upaya optimalisasi peran dan fungsi tempat peribadatan bukan hanya sebagai tempat ibadah ritual, namun menjadi sentral kegiatan keagamaan dan juga kegiatan sosial lainnya.

Peran dana sosial keagamaan dalam pembangunan bidang agama juga sangat strategis. Pengelolaan dana sosial keagamaan masih belum optimal dalam menyerap potensi dan mendayagunakannya untuk kepentingan masyarakat. Padahal, dana sosial keagamaan memiliki potensi yang sangat besar dalam usaha meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi angka kemiskinan, dan membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat usia produktif. Untuk itu, pengelolaan dana sosial keagamaan seperti zakat, wakaf, sedekah, kolekte, punia, dan paramita perlu makin dioptimalkan. Pemerintah telah mengupayakan optimalisasi mutu pengelolaan dana sosial keagamaan, peningkatan kesadaran dan kepercayaan masyarakat, pengembangan program asistensi kelembagaan, peningkatan infra struktur dan sumberdaya, sosialisasi berbagai peraturan perundang-undangan, dan meningkatkan efektifitas koordinasi dan hubungan antarlembaga pengelola dana sosial keagamaan. Ke depan, sangat penting adanya komitmen untuk mendorong mutu pengelolaan dana sosial keagamaan dengan mengembangkan program asistensi, penguatan kapasitas kelembagaan, menyediakan sistem informasi pelayanan dana keagamaan, dan meningkatkan peraturan perundang-undangan.

Khusus berkaitan dengan zakat, laporan hasil penelitian menyebutkan bahwa potensi dana zakat Indonesia diperkirakan mencapai Rp. 20 triliun (*Public Interest*



Research and Advocacy Center, 2006). Potensi zakat yang begitu besar tersebut saat ini masih belum dapat dikumpulkan dan dikelola dengan baik. Lembaga pengelola zakat hanya berhasil menyerap lebih kurang 2 persen dari potensi yang ada. Masih rendahnya zakat yang terkumpul disebabkan, antara lain oleh belum meratanya kesadaran dan kepercayaan publik, dalam hal ini para pembayar zakat, untuk menunaikan zakat, infaq, dan sedekah melalui lembaga pengelola zakat di lingkungannya; masih terbatasnya infrastruktur dan sumberdaya yang dimiliki Badan Amil Zakat Daerah; pembayaran zakat sejauh ini hanya diperhitungkan sebagai unsur biaya perhitungan Penghasilan Kena Pajak; belum tersedianya peta kemiskinan dan *database* para dermawan; dan masih belum efektifnya pola hubungan dan koordinasi antarlembaga pengelola zakat di tanah air. Merebaknya Perda-Perda pengelolaan zakat di beberapa daerah provinsi dan kabupaten/kota juga belum banyak memberikan kontribusi signifikan dalam mobilisasi dan pengelolaan zakat.

Bentuk lain dana sosial keagamaan yang sangat potensial adalah wakaf. Menurut data yang dihimpun Departemen Agama RI, jumlah tanah wakaf sampai tahun 2007 tercatat sebanyak 404.676 lokasi, yang tersebar di seluruh provinsi di Indonesia. Dari jumlah tersebut, 304.662 lokasi di antaranya sudah bersertifikat, 40.024 lokasi terdaftar di BPN, sementara 59.990 lokasi lainnya belum terdaftar. Jumlah wakaf di Indonesia merupakan yang terbesar di seluruh dunia. Hal ini menjadi peluang sekaligus tantangan bagi pemerintah bersama-sama masyarakat untuk memfungsikan harta wakaf secara lebih bermanfaat dan produktif. Penelitian Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama tahun 2007 menyebutkan bahwa sebagian besar tanah wakaf dikelola secara tradisional, dan para pengelola tanah wakaf tidak memiliki pemahaman dan kemampuan memadai untuk mengembangkan menjadi wakaf produktif.

Lembaga sosial keagamaan juga memiliki peran yang besar dalam pembangunan bidang agama. Lembaga-lembaga sosial keagamaan yang telah ada di tengah masyarakat merupakan modal sosial bangsa. Selama ini kerjasama pemerintah dalam upaya membangun keharmonisan hidup beragama telah dilaksanakan melalui cara menjalin hubungan yang komunikatif dan dialogis dengan berbagai kelompok dan lembaga sosial keagamaan yang merupakan wadah atau forum keagamaan. Namun, kapasitas dan kualitas lembaga sosial keagamaan dan lembaga pendidikan keagamaan masih belum sepenuhnya menjawab tantangan dan dinamika yang berkembang di tengah masyarakat.

Sementara itu, tata kelola yang efektif, efisien, dan akuntabel sangat menentukan kinerja pembangunan bidang agama secara keseluruhan. Berbagai upaya perbaikan tata kelola dan kebijakan bidang agama telah dilaksanakan selama ini, tetapi upaya tersebut masih belum sepenuhnya mampu menjawab tuntutan kebutuhan masyarakat yang sangat dinamis. Selain itu, peraturan perundang-undangan yang mengatur tata kelola kehidupan beragama untuk menjamin hak dan kebebasan beragama warganya dan hak untuk mendapatkan pelayanan keagamaan secara layak perlu diperkuat. Selanjutnya, peningkatan kapasitas tata kelola pembangunan agama perlu didukung program riset

dan pengembangan yang relevan dan strategis, penyediaan data dan informasi hasil-hasil penelitian yang relevan dan berkualitas, serta penguatan kapasitas lembaga penelitian untuk memberikan bahan masukan bagi perencanaan dan pengembangan kebijakan pembangunan bidang agama.

Dengan demikian, tantangan yang dihadapi adalah meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana ibadah terutama di daerah terpencil dan daerah terkena bencana, termasuk menjamin keamanan dan kenyamanan seluruh masyarakat dalam melaksanakan aktivitas keagamaannya; meningkatkan peran lembaga-lembaga sosial keagamaan; dan meningkatkan mutu pengelolaan dana sosial dan memperkuat status hukum aset sosial keagamaan yang didukung oleh tata kelola yang efektif, efisien dan akuntabel.

Penyelenggaraan ibadah haji belum optimal. Berbagai langkah penting terus dilakukan untuk meningkatkan kualitas dalam setiap tahapan penyelenggaraan ibadah haji. Dengan didukung proses evaluasi secara berkesinambungan, kualitas pelayanan haji terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Hal ini antara lain dapat terlihat pada manajemen pelayanan dan penyediaan fasilitas pendukung di Arab Saudi yang makin baik, peningkatan pemahaman pelaksanaan ibadah haji kepada calon jemaah, peningkatan profesionalisme petugas haji, perbaikan sistem *waiting list* untuk menjamin kepastian keberangkatan jemaah, jarak tempuh melalui penerbangan langsung Jakarta-Madinah yang makin singkat, peningkatan kuota haji, dan pengurangan biaya tidak langsung penyelenggaraan ibadah haji. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, sejak musim haji tahun 2006 biaya tidak langsung penyelenggaraan haji yang semula ditanggung jemaah dialihkan menjadi tanggungan pemerintah. Di samping itu, pemerintah mengupayakan peningkatan mutu pelayanan umrah yang dilakukan antara lain melalui optimalisasi fasilitasi dan pembinaan kepada kelompok bimbingan ibadah haji (KBIH). Upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji juga dilakukan dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh. Dalam Undang-Undang tersebut diamanatkan bahwa penyelenggaraan haji ke depan harus memperhatikan prinsip-prinsip yang berdasarkan profesionalisme, akuntabilitas, dan nirlaba.

Namun, penyelenggaraan ibadah haji masih belum memuaskan bagi sebagian kalangan masyarakat. Pelayanan ibadah haji masih menunjukkan berbagai kelemahan, mulai dari pendaftaran sampai pelaksanaannya di Arab Saudi, keberangkatan dan kepulangan ke tanah air. Kondisi ini sering menimbulkan kekecewaan masyarakat dan reaksi berbagai pihak. Hal lainnya mengenai pembagian kuota antardaerah yang dipandang belum adil, jaminan kepastian keberangkatan calon jemaah haji, kondisi pemondokan, jarak pemondokan dari Masjidil Haram, pelayanan transportasi yang belum memadai, serta sistem informasi haji yang belum sepenuhnya terintegrasi.

Dengan demikian, tantangan ke depan adalah meningkatkan kualitas pelayanan



haji dan umrah antara lain yang berkaitan dengan peningkatan mutu kebijakan, penerapan standardisasi pelayanan, pembenahan manajemen asrama haji, peningkatan kepastian keberangkatan, peningkatan profesionalisme petugas, peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana penyelenggaraan haji, pengurangan beban biaya tidak langsung jemaah, penyesuaian kuota, peningkatan kualitas pemondokan, transportasi dan konsumsi, serta penguatan sistem informasi haji yang terintegrasi dan handal.

2.2.1.6 Jati Diri Bangsa yang Belum Mantap dan Pelestarian Budaya yang Belum Optimal

Karakter dan jati diri bangsa belum kuat. Semakin derasnya arus globalisasi yang didorong oleh kemajuan teknologi komunikasi dan informasi telah membuka peluang terjadinya interaksi budaya antarbangsa. Proses interaksi budaya tersebut di satu sisi berpengaruh positif terhadap perkembangan dan perubahan orientasi nilai dan perilaku bangsa Indonesia, di sisi lain, dapat menimbulkan pengaruh negatif, seperti semakin mudarnya penghargaan pada nilai budaya dan bahasa, nilai solidaritas sosial, kekeluargaan, rasa cinta tanah air, serta berbagai perilaku yang tidak sesuai dengan nilai, norma, dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Kondisi ini ditunjukkan, antara lain, oleh munculnya gejala menurunnya kualitas penggunaan bahasa Indonesia, menurunnya rasa cinta terhadap produk dalam negeri, serta menurunnya sikap toleransi dan tenggang rasa dalam masyarakat sehingga menimbulkan potensi terjadinya pertikaian dan konflik antarwarga. Data BPS menunjukkan bahwa jumlah konflik yang terjadi masih cukup tinggi, yaitu sebanyak 2.687 kasus (Podes 2008). Dari sejumlah kasus konflik tersebut, jenis konflik yang paling sering terjadi adalah konflik antarkelompok warga (46,0 persen), konflik warga antardesa/kelurahan (34,9 persen), serta konflik antarsuku/etnis (4,4 persen). *Dengan demikian, tantangan ke depan adalah memelihara dan melestarikan nilai-nilai tradisi luhur seperti, cinta tanah air, nilai solidaritas sosial, dan keramahmataman yang menjadi identitas budaya yang berfungsi sebagai perekat persatuan bangsa dalam segenap aspek kehidupan masyarakat.*

Pemahaman dan apresiasi masyarakat terhadap keragaman budaya masih rendah. Keragaman seni-budaya dan tradisi telah menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang kaya dengan berbagai bentuk ekspresi budaya dan pengetahuan tradisional, seperti seni rupa, seni pertunjukan, seni media, cerita rakyat, permainan tradisional, tekstil tradisional, pasar tradisional, dan upacara tradisional. Keragaman seni, budaya, dan tradisi yang merupakan kekayaan budaya ini perlu dipelihara, dilindungi dan dikembangkan oleh masyarakat. Pengembangan seni, budaya, dan tradisi memiliki fungsi yang sangat penting dalam meningkatkan apresiasi masyarakat dari generasi ke generasi terhadap keragaman budaya, yang adaptif terhadap pengaruh positif budaya global untuk kemajuan bangsa. Sesuai dengan perkembangan dan dinamika kehidupan masyarakat, peningkatan apresiasi dan penyaluran kreativitas berkesenian masyarakat menghadapi kendala, antara lain: (1) terbatasnya sarana dan prasarana kesenian,

seperti galeri, taman budaya, gedung kesenian, dan gedung bioskop; (2) menurunnya minat masyarakat dalam menonton kegiatan seni-budaya; (3) terjadinya pembajakan karya cipta seni dan budaya. *Dengan demikian, tantangan ke depan adalah peningkatan pemahaman dan apresiasi masyarakat terhadap seni dan budaya serta perlindungan terhadap hak atas kekayaan intelektual (HKI), terutama karya cipta seni dan budaya baik yang bersifat individual maupun kolektif.*

Kualitas pengelolaan warisan budaya masih rendah. Kondisi objektif dewasa ini menunjukkan bahwa pada era otonomi daerah, kualitas pengelolaan warisan budaya bangsa, seperti benda cagar budaya, situs, kawasan cagar budaya, dan museum masih sangat beragam. Berdasarkan data tahun 2007, jumlah benda cagar budaya (BCB) yang telah diinventarisasi adalah sebanyak 8.232 buah (Depbudpar). Dari jumlah tersebut, BCB yang dipelihara baru mencakup 1.847 buah (22,4 persen), sedangkan BCB yang telah dipugar baru sebanyak 422 buah (5,1 persen). Kasus pencurian, penyelundupan, dan perusakan situs dan BCB juga mengalami peningkatan dari 5 kasus pada tahun 2005 menjadi 10 kasus pada tahun 2007 (Depbudpar, 2007). Di samping itu, apresiasi dan kesadaran masyarakat terhadap warisan budaya seperti candi, istana, tugu, monumen dan tempat bersejarah lainnya masih belum berkembang yang antara lain ditunjukkan dengan menurunnya jumlah pengunjung dari 4,8 juta orang pada tahun 2006 menjadi 3,1 juta orang pada tahun 2008 (Depbudpar, 2008). Hal tersebut menunjukkan masih kurangnya apresiasi, pemahaman, komitmen, dan kesadaran tentang arti pentingnya warisan budaya dengan berbagai kandungan nilai-nilai luhurnya sebagai sarana edukasi dan rekreasi yang dapat mengilhami berkembangnya industri budaya yang memiliki nilai ekonomi berkelanjutan. *Dengan demikian, tantangan ke depan adalah peningkatan upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan warisan budaya sebagai sarana rekreasi, edukasi, dan pengembangan kebudayaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.*

Sumber daya di bidang kebudayaan masih terbatas. Keberhasilan pembangunan kebudayaan juga dipengaruhi oleh dukungan sumber daya yang memadai, seperti sumberdaya manusia, sarana dan prasarana kebudayaan, kelembagaan, pendanaan, kemitraan, serta penelitian dan pengembangan. Oleh karena itu, sumberdaya kebudayaan perlu dikembangkan secara berkelanjutan. Dalam pelaksanaannya, pengembangan sumberdaya kebudayaan menghadapi beberapa permasalahan, antara lain adalah: (1) terbatasnya sumberdaya manusia di bidang kebudayaan yang berkualitas; (2) belum optimalnya hasil penelitian dan pengembangan kebudayaan; (3) terbatasnya sarana dan prasarana kebudayaan; (4) terbatasnya dukungan peraturan perundangan kebudayaan; (5) terbatasnya kemampuan pendanaan; serta (6) belum optimalnya koordinasi antarinstansi di tingkat pusat dan daerah serta belum optimalnya kerja sama antarpihak, yaitu pemerintah, swasta dan masyarakat. *Tantangan ke depan adalah peningkatan kapasitas sumber daya pembangunan kebudayaan yang didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten, kualitas dan intensitas hasil penelitian sebagai bahan rumusan kebijakan pembangunan*



di bidang kebudayaan, sarana dan prasarana yang memadai, tata pemerintahan yang baik (good governance), serta koordinasi antartingkat pemerintahan yang efektif.

2.2.1.7 Akses dan Kualitas Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang Terbatas

Ketersediaan akses dan kualitas pelayanan kesejahteraan sosial perlu dibedakan berdasarkan kelompok PMKS. Gambaran masih rendahnya cakupan pelayanan kesejahteraan sosial bagi PMKS dapat terlihat pada Tabel 2.3 di atas. Intervensi yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kesehatan ibu dan anak pada umumnya dilaksanakan dengan perluasan cakupan pelayanan (aspek penyediaan). Khusus untuk masyarakat miskin, upaya mempercepat pencapaian target penurunan angka kematian ibu dan anak perlu didukung dengan intervensi yang langsung diberikan kepada mereka, berupa insentif untuk mengakses pelayanan kesehatan di pusat pelayanan kesehatan terdekat (aspek permintaan).

Pada tahun 2000 (SDKI, 2002–2003), alasan tertinggi penyebab masyarakat tidak dapat mengakses pusat pelayanan kesehatan adalah keterbatasan dana (34 persen). Meskipun membaik pada tahun 2007 alasan ekonomi masih merupakan penyebab terpenting masyarakat miskin tidak dapat mengakses pelayanan kesehatan, yaitu sebesar 25 persen (SDKI, 2007). Akses pada pelayanan pendidikan memiliki gambaran yang hampir sama. Pada tahun 2003 penyebab tertinggi (67 persen) anak usia 7–18 tahun tidak dapat bersekolah adalah ketiadaan dana. Meskipun membaik pada tahun 2007 alasan tidak bersekolah akibat ketiadaan dana masih tetap besar, yaitu 57,2 persen (Susenas 2003, 2007).

Di samping cakupan yang rendah, kegiatan bantuan sosial bagi PMKS yang selama ini dilakukan masih tumpang tindih. Penerima bantuan sosial dari sebuah program, pada umumnya akan menerima tambahan bantuan melalui program lainnya. Masalah ini dapat dihindari jika penajaman pada tingkat kebijakan dan penetapan sasaran program dilakukan dengan baik. Selanjutnya, pada tingkat pelaksanaan, masalah kelembagaan masih mendominasi permasalahan pelayanan kesejahteraan sosial. Alih fungsi panti sosial, yang sebelumnya dibangun oleh Pemerintah, di beberapa daerah digunakan untuk kegiatan selain pelayanan kesejahteraan sosial. Sementara itu, upaya pemberdayaan sosial yang seharusnya meletakkan berbagai upaya untuk membangun kapasitas individu dan kelembagaan PMKS masih belum berjalan secara optimal. Keputusan bagi penyelesaian masalah yang dihadapi oleh PMKS masih lebih banyak dilakukan oleh aparat pemerintah sehingga bantuan yang disediakan pemerintah seringkali tidak tepat sasaran atau tidak tepat guna. *Tantangan ke depan adalah meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesejahteraan sosial dengan didukung oleh peningkatan pengelolaan program, peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM serta tata kelola pemerintahan.*

2.2.1.8 Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak yang Belum Optimal

Kapasitas kelembagaan PUG masih terbatas dan pemberdayaan perempuan belum optimal. Walaupun berbagai kemajuan telah dicapai dalam peningkatan kesetaraan gender, kualitas hidup dan peran perempuan belum optimal, yang antara lain ditunjukkan dengan lambatnya peningkatan nilai IDG setiap tahunnya. Hal ini mengindikasikan bahwa peningkatan kesetaraan gender di bidang ekonomi dan ketenagakerjaan, politik, serta pengambilan keputusan belum signifikan yang, antara lain, disebabkan oleh: (1) masih terdapatnya kesenjangan gender dalam hal akses, manfaat, dan partisipasi dalam pembangunan, serta penguasaan terhadap sumber daya pada tataran antarprovinsi dan antarkabupaten/kota; (2) rendahnya peran dan partisipasi perempuan di bidang politik, jabatan-jabatan publik, dan di bidang ekonomi; dan (3) rendahnya kesiapan perempuan dalam mengantisipasi dampak perubahan iklim, krisis energi, krisis ekonomi, bencana alam, dan konflik sosial, serta terjadinya penyakit. Sementara itu, perlindungan bagi perempuan terhadap berbagai tindak kekerasan juga masih belum mencukupi, yang terlihat dari masih belum memadainya jumlah dan kualitas tempat pelayanan bagi perempuan korban kekerasan karena banyaknya jumlah korban yang harus dilayani dan luasnya cakupan wilayah yang harus dijangkau.

Permasalahan tersebut muncul karena belum efektifnya kelembagaan PUG dan pemberdayaan perempuan yang, antara lain, terlihat dari: (1) belum optimalnya penerapan peranti hukum, peranti analisis, dan dukungan politik terhadap kesetaraan gender sebagai prioritas pembangunan; (2) belum memadainya kapasitas kelembagaan dalam pelaksanaan PUG, terutama sumber daya manusia, serta ketersediaan dan penggunaan data terpilah menurut jenis kelamin dalam siklus pembangunan; dan (3) masih rendahnya pemahaman mengenai konsep dan isu gender serta manfaat PUG dalam pembangunan, terutama di kabupaten/kota. Untuk itu, *tantangan yang dihadapi adalah: meningkatkan pemahaman para pemangku kepentingan terkait akan pentingnya pembangunan yang responsif gender; meningkatkan koordinasi pelaksanaan dan harmonisasi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perlindungan bagi perempuan terhadap berbagai tindak kekerasan; dan meningkatkan kapasitas kelembagaan PUG dan pemberdayaan perempuan, serta koordinasi pelaksanaannya.*

Kapasitas kelembagaan perlindungan anak masih terbatas. Pada tahun 2008, jumlah anak berusia 0–17 tahun di Indonesia adalah sekitar 74,9 juta jiwa, atau sekitar 32,8 persen dari total penduduk. Sementara itu, jumlah anak usia dini (0–6 tahun) sangat besar yaitu sekitar 29,3 juta jiwa atau 12,8 persen dari total penduduk. Permasalahan yang masih dihadapi oleh kelompok umur tersebut adalah belum optimalnya pemenuhan kebutuhan esensial anak yang mencakup berbagai stimulasi dini dan pelayanan tumbuh kembang anak untuk kesiapan belajar dalam memasuki jenjang sekolah dasar; derajat kesehatan dan gizi anak; serta pengasuhan dan



perlindungan anak. Di samping itu, masih banyak anak yang tidak bersekolah, yang terutama disebabkan oleh kemiskinan. Selanjutnya, hal ini berdampak pada banyaknya pekerja anak, terutama di perdesaan.

Di bidang kesehatan, salah satu permasalahan yang dihadapi adalah masih tingginya kematian bayi dan balita, yang antara lain disebabkan oleh peningkatan infeksi HIV dan AIDS. Dampak hal tersebut terhadap anak di antaranya adalah kehilangan pengasuhan karena orang tua meninggal dunia, kehilangan sumber daya ekonomi karena biaya pengobatan yang relatif mahal, dan risiko menghadapi akibat-akibat infeksi itu dalam dirinya sendiri. Selain itu, jumlah anak yang belum mendapatkan akta kelahiran, sebagai salah satu pemenuhan hak-hak sipil, masih tinggi. Sementara itu, masih terdapat pula permasalahan dalam perlindungan anak dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi.

Permasalahan dalam perlindungan anak tersebut muncul, antara lain, karena belum efektifnya pelaksanaan perlindungan anak yang ditunjukkan dengan: (1) masih terdapatnya peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang tidak konsisten dengan KHA dan Undang-Undang Perlindungan Anak yang berpotensi merugikan dan menghambat pemenuhan hak-hak anak; dan (2) masih lemahnya kualitas dan kapasitas kelembagaan dan belum adanya mekanisme komprehensif yang berlaku dari pusat ke daerah yang ditujukan untuk melindungi anak. Mekanisme yang ada masih bersifat sektoral dan belum memadai sehingga belum dapat menciptakan lingkungan yang aman bagi anak, dan belum memberikan wadah bagi setiap anggota masyarakat, termasuk anak-anak, untuk berpartisipasi dalam upaya pemenuhan hak anak. Di samping itu, sistem pengelolaan data dan informasi serta indeks komposit perlindungan anak yang terpilah, yang mutakhir dan mudah diakses, juga belum tersedia.

Mengingat bahwa perlindungan anak tersebut meliputi sekitar 30 persen dari total penduduk Indonesia, *tantangan yang harus dihadapi dalam meningkatkan efektivitas perlindungan anak adalah: meningkatkan koordinasi pelaksanaan dan sinkronisasi kebijakan yang terkait dengan kualitas tumbuh kembang dan kelangsungan hidup anak; meningkatkan koordinasi pelaksanaan dan penegakan hukum yang terkait dengan perlindungan bagi anak terhadap segala bentuk kekerasan dan diskriminasi; dan meningkatkan kapasitas kelembagaan, ketersediaan data dan informasi, koordinasi pelaksanaan, dan harmonisasi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perlindungan anak.*

2.2.2. Sasaran Pembangunan Tahun 2010–2014

Berdasarkan permasalahan dan tantangan tersebut di atas, sasaran umum pembangunan bidang sosial budaya dan kehidupan beragama yang akan dicapai pada akhir tahun 2014 adalah meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang ditandai dengan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Indeks Pembangunan Gender (IPG) yang didukung dengan menurunnya *Net Reproduction Rate* (NRR) = 1,0;

dan makin kuatnya jati diri dan karakter bangsa.

Secara khusus, sasaran pembangunan sosial budaya dan kehidupan beragama yang akan dicapai pada akhir tahun 2014 adalah sebagai berikut.

1. Terkendalinya jumlah dan laju pertumbuhan penduduk yang ditandai dengan:

Sasaran	Status Awal	Target 2014
a. Menurunnya rata-rata laju pertumbuhan penduduk tingkat nasional (persen per tahun)	1,3 a)	1, 1
b. Menurunnya TFR per perempuan usia reproduksi	2,3 b)	2, 1
c. Meningkatnya CPR cara modern (persen)	57, 4 b)	6 5,0
d. Menurunnya kebutuhan ber-KB tidak terlayani/ <i>unmet need</i> dari jumlah pasangan usia subur (persen)	9,1 b)	5, 0
e. Menurunnya ASFR 15-19 tahun per 1.000 perempuan	35 b)	3 0
f. Meningkatnya median usia kawin pertama perempuan (tahun)	19, 8 b)	2 1
g. Menurunnya disparitas TFR, CPR dan <i>unmet need</i> antarwilayah dan antartingkat sosial ekonomi		
h. Meningkatnya keserasian kebijakan pengendalian penduduk		
i. Meningkatnya ketersediaan dan kualitas data dan informasi kependudukan, yang bersumber dari sensus, survei, dan registrasi vital kependudukan		

Status awal : a) SUPAS, 2005; dan b) SDKI, 2007

2. Meningkatnya status kesehatan dan gizi masyarakat yang ditandai dengan:

Sasaran	Status Awal	Target 2014
a. Meningkatnya umur harapan hidup (tahun)	70,7 a)	72, 0
b. Menurunnya angka kematian ibu melahirkan per 100.000 kelahiran hidup	228 b)	118
c. Menurunnya angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup	34 b)	24
d. Menurunnya angka kematian neonatal per 1.000 kelahiran hidup	19 b)	15

e. Menurunnya prevalensi kekurangan gizi (terdiri dari gizi-kurang dan gizi-buruk) pada anak balita (persen)	18,4 c)	< 15,0
f. Menurunnya prevalensi anak balita yang pendek/ <i>stunting</i> (persen)	36,8 c)	< 32,0

Status awal: a) Proyeksi BPS, 2008; b) SDKI, 2007; dan c) Riskesdas, 2007

3. Menurunnya angka kesakitan akibat penyakit menular yang ditandai dengan:

Sasaran	Status Awal ^{*)}	Target 2014
a. Menurunnya prevalensi <i>tuberculosis</i> per 100.000 penduduk	23 5	22 4
b. Menurunnya kasus malaria (<i>Annual Parasite Index-API</i>) per 1.000 penduduk	2	1
c. Terkendalinya prevalensi HIV pada populasi dewasa (persen)	0,2	< 0,5
d. Meningkatnya cakupan imunisasi dasar lengkap anak usia 0–11 bulan (persen)	80	90

^{*)} Status awal adalah estimasi capaian program 2010 (Berdasarkan Laporan Program Depkes, 2008)

4. Menurunnya disparitas status kesehatan dan gizi masyarakat antarwilayah dan antartingkat sosial ekonomi serta gender.
5. Meningkatnya penyediaan anggaran publik untuk kesehatan dalam rangka mengurangi risiko finansial akibat gangguan kesehatan bagi seluruh penduduk terutama penduduk miskin.
6. Meningkatnya perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) pada tingkat rumah tangga dari 50 persen menjadi 70 persen.
7. Terpenuhinya kebutuhan tenaga kesehatan strategis di daerah terpencil, tertinggal, perbatasan dan kepulauan.
8. Meningkatnya taraf pendidikan masyarakat yang ditandai dengan:

Sasaran	Status Awal ^{a)}	Target 2014
a. Meningkatnya rata-rata lama sekolah penduduk berusia 15 tahun ke atas (tahun)	7,5 0	8,25
b. Menurunnya angka buta aksara penduduk berusia 15 tahun ke atas (persen)	5,9 7	4,18

c. Meningkatnya APM SD/SDLB/MI/Paket A (persen)	95, 14	96,0
d. Meningkatnya APM SMP/SMPLB/MTs/Paket B (persen)	72, 28	76,0
e. Meningkatnya APK SD/SDLB/MI/Paket A (persen)	116, ,56	119, 1
f. Meningkatnya APK SMP/SMPLB/MTs/Paket B (persen)	96, 18	110, 0
g. Meningkatnya APK SMA/SMK/MA/Paket C (persen)	64, 28	85,0
h. Meningkatnya APK PT usia 19–23 tahun (persen)	21, 26	30,0 b)
i. Meningkatnya APS penduduk usia 7–12 tahun (persen)	97, 83	> 99,0
j. Meningkatnya APS penduduk usia 13–15 tahun (persen)	84, 41	> 95,0
k. Meningkatnya tingkat efisiensi internal yang ditandai dengan meningkatnya angka melanjutkan dan menurunnya angka putus sekolah untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah		
l. Menurunnya disparitas partisipasi dan kualitas pelayanan pendidikan antarwilayah, gender, dan sosial ekonomi, serta antarsatuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah dan masyarakat		

Catatan: ^{a)} Status awal adalah data pada tahun 2008; ^{b)} Atau sama dengan APK PT usia 19–24 tahun 2014 sebesar 25,0 persen

9. Meningkatnya kualitas dan relevansi pendidikan yang ditandai dengan:

- a. meningkatnya APK pendidikan anak usia dini (PAUD);
- b. meningkatnya tingkat keberkerjaan lulusan pendidikan kejuruan;
- c. meningkatnya proporsi satuan pendidikan baik negeri maupun swasta yang terakreditasi baik (B) pada jenjang SD/SDLB/MI menjadi sebesar 15,0 persen; SMP/SMPLB/MTs menjadi sebesar 27,0 persen; SMA/SMALB/MA menjadi sebesar 40,0 persen; dan SMK menjadi sebesar 30,0 persen;
- d. meningkatnya proporsi program studi PT yang terakreditasi menjadi sebesar 90,0 persen dan makin banyaknya PT yang masuk dalam peringkat besar dunia (TOP 500 THES) menjadi sebesar 11 PT;
- e. meningkatnya proporsi satuan pendidikan yang memenuhi standar pelayanan minimal menjadi 100 persen untuk jenjang pendidikan dasar; dan



- f. tercapainya Standar Pendidikan Nasional (SNP) bagi satuan pendidikan agama dan pendidikan keagamaan paling lambat pada tahun 2013.
10. Meningkatnya kualifikasi dan kompetensi guru, dosen, dan tenaga kependidikan yang ditandai dengan:
- g. meningkatnya persentase guru yang memenuhi kualifikasi S1/D4 untuk SD/MI/SDLB, SMP/MTs/SMPLB, SMA/SMK/MA/SMALB dan sederajat masing-masing menjadi sebesar 88,0 persen; 98,0 persen; dan 98,0 persen;
 - h. meningkatnya persentase guru SD/MI/SDLB, SMP/MTs/SMPLB, SMA/SMK/MA/SMALB dan sederajat yang telah tersertifikasi masing-masing menjadi sebesar 80,0 persen; 90,0 persen; dan 90,0 persen;
 - i. meningkatnya proporsi dosen program sarjana/diploma/profesi yang berkualifikasi minimal S2 menjadi sebesar 85,0 persen dan dosen program pascasarjana yang berkualifikasi S3 menjadi sebesar 90,0 persen;
 - j. membaiknya pemerataan distribusi guru antarsatuan pendidikan dan antarwilayah termasuk terpenuhinya kebutuhan guru di daerah terpencil, perbatasan, kepulauan sesuai dengan standar pelayanan minimal; dan
 - k. meningkatnya kapasitas tenaga kependidikan termasuk kepala sekolah dan pengawas sekolah dalam pengelolaan dan penjaminan mutu pendidikan.
11. Meningkatnya pembiayaan pendidikan yang berkeadilan yang ditandai:
- a. terselenggaranya pendidikan dasar sembilan tahun bermutu yang terjangkau bagi semua dalam kerangka pelaksanaan standar pelayanan minimal pendidikan dasar untuk mencapai standar nasional pendidikan; dan
 - b. meningkatnya proporsi peserta didik yang mendapatkan beasiswa bagi keluarga miskin untuk jenjang pendidikan dasar sampai dengan perguruan tinggi.
12. Meningkatnya minat dan budaya gemar membaca masyarakat dan layanan perpustakaan yang ditandai oleh meningkatnya kualitas dan kapasitas perpustakaan, serta terlaksananya revitalisasi perpustakaan.
13. Meningkatnya partisipasi dan peran aktif pemuda di berbagai bidang pembangunan yang ditandai antara lain:
- a. meningkatnya *character building*, revitalisasi gerakan kepemudaan;

- b. terlaksananya revitalisasi gerakan pramuka;
- c. meningkatnya penguasaan teknologi, jiwa kewirausahaan, dan kreativitas pemuda;
- d. meningkatnya partisipasi pemuda dalam kegiatan organisasi kepemudaan;
- e. meningkatnya taraf pendidikan pemuda; dan
- f. meningkatnya kewirausahaan, kepemimpinan, dan kepeloporan pemuda.

14. Meningkatnya budaya dan prestasi olahraga yang ditandai dengan:

- a. meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan olahraga;
- b. meningkatnya prestasi olahraga di tingkat regional dan internasional;
- c. tercapainya posisi papan atas pada *South East Asia (SEA) Games* pada tahun 2011; dan
- d. meningkatnya perolehan medali di Asian Games tahun 2010 dan Olimpiade tahun 2012.

15. Meningkatnya kualitas kehidupan beragama yang ditandai dengan:

- a. meningkatnya kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama pada masyarakat;
- b. terwujudnya kehidupan sosial yang harmonis, rukun dan damai di kalangan umat beragama;
- c. meningkatnya kualitas dan profesionalisme pelayanan ibadah haji yang ditandai dengan pelaksanaan ibadah haji yang tertib dan lancar paling lambat pada 2010; dan
- d. meningkatnya tatakelola pembangunan bidang agama.

16. Meningkatnya upaya pengembangan budaya untuk menciptakan masyarakat dan bangsa Indonesia yang memiliki budaya dan peradaban luhur dan mampu menjaga jati diri di tengah pergaulan global yang ditandai dengan:

- a. meningkatnya kesadaran dan pemahaman masyarakat akan pentingnya karakter dan jati diri bangsa agar memiliki ketahanan budaya yang tangguh;
- b. meningkatnya apresiasi masyarakat terhadap keragaman seni dan budaya, serta kreativitas seni dan budaya yang didukung oleh suasana yang kondusif dalam penyaluran kreativitas berkesenian masyarakat;
- c. meningkatnya perhatian dan kesertaan pemerintah dalam program-program seni budaya yang diinisiasi oleh masyarakat dan mendorong berkembangnya apresiasi terhadap kemajemukan budaya;



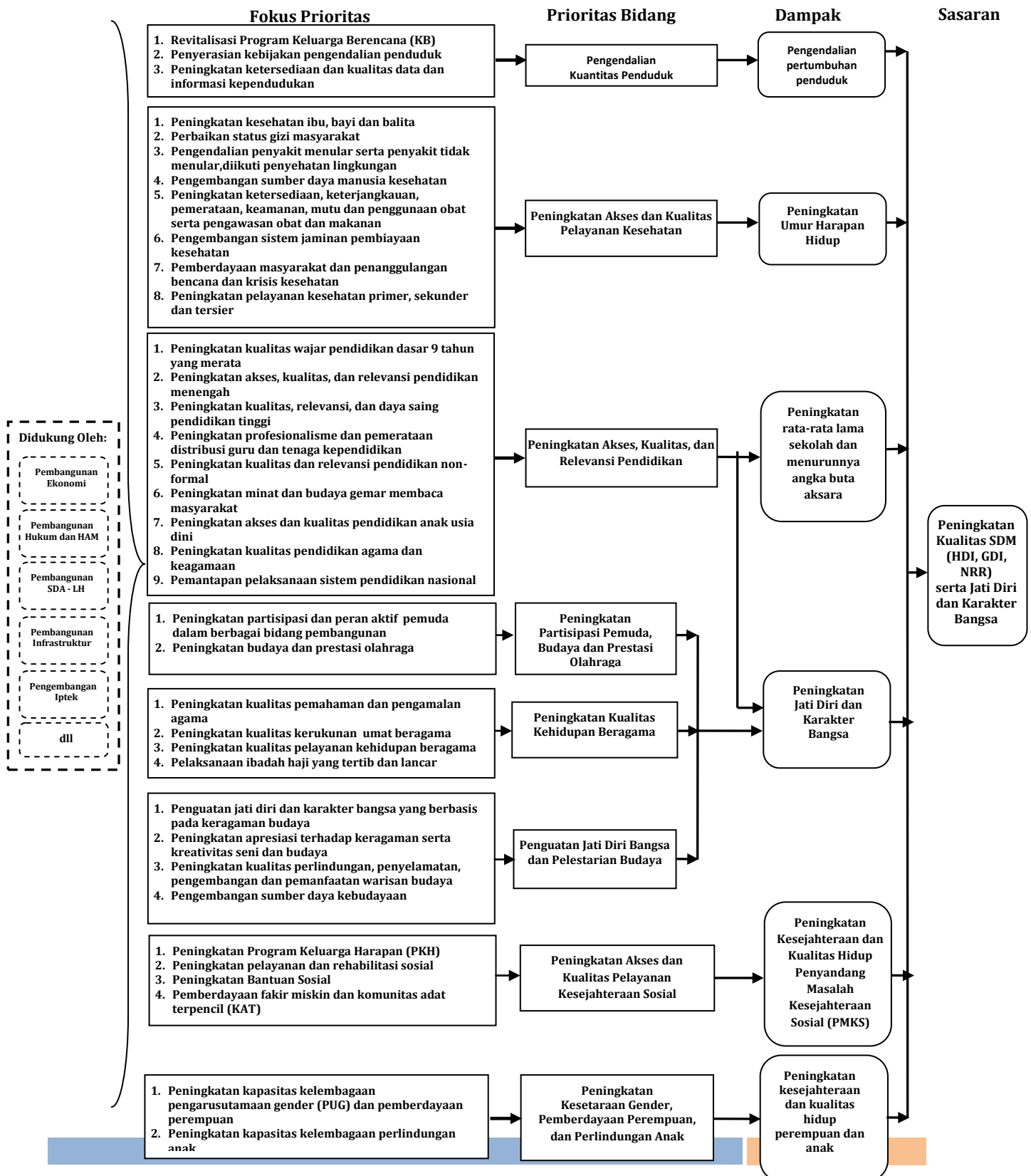
- d. meningkatnya penyediaan sarana yang memadai bagi pengembangan, pendalaman dan pergelaran seni budaya di kota besar dan ibu kota kabupaten selambat-lambatnya Oktober 2012;
 - e. meningkatnya kualitas perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan warisan budaya;
 - f. terlaksananya penetapan dan pembentukan pengelolaan terpadu untuk pengelolaan cagar budaya, revitalisasi museum dan perpustakaan di seluruh Indonesia sebelum Oktober 2011;
 - g. meningkatnya kapasitas sumber daya pembangunan kebudayaan, dan
 - h. meningkatnya kapasitas nasional untuk pelaksanaan penelitian, penciptaan dan inovasi dan memudahkan akses dan penggunaannya oleh masyarakat luas di bidang kebudayaan.
17. Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesejahteraan sosial yang ditandai dengan:
- a. meningkatnya jangkauan/cakupan pelayanan dan rehabilitasi sosial terhadap PMKS; dan
 - b. meningkatnya kualitas pelaksanaan bantuan sosial bagi masyarakat miskin dan rentan termasuk komunitas adat terpencil (KAT).
18. Meningkatnya efektivitas kelembagaan PUG dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan dan program pembangunan yang responsif gender di tingkat nasional dan daerah.
19. Meningkatnya efektivitas kelembagaan perlindungan anak, baik di tingkat nasional maupun daerah.

2.3 Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan

Pembangunan bidang sosial budaya dan kehidupan beragama diarahkan untuk mencapai sasaran peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang ditandai dengan meningkatnya indeks pembangunan manusia (IPM) dan indeks pembangunan gender (IPG) yang didukung oleh tercapainya penduduk tumbuh seimbang; serta makin kuatnya jati diri dan karakter bangsa. Pencapaian sasaran tersebut, ditentukan oleh terkendalinya pertumbuhan penduduk, meningkatnya umur harapan hidup (UHH), meningkatnya rata-rata lama sekolah dan menurunnya angka buta aksara, meningkatnya kesejahteraan dan kualitas hidup perempuan dan anak, serta meningkatnya jati diri bangsa. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia juga diarahkan untuk mengurangi berbagai kesenjangan, yaitu antarwilayah, antartingkat sosial ekonomi dan gender.

Pembangunan bidang sosial budaya dan kehidupan beragama pada tahun 2010–2014 diprioritaskan pada pengendalian kuantitas penduduk, peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan, peningkatan akses dan kualitas pelayanan pendidikan, peningkatan partisipasi pemuda, budaya dan prestasi olahraga, peningkatan kualitas kehidupan beragama, dan penguatan jati diri bangsa dan pelestarian budaya, peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesejahteraan sosial, peningkatan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, serta perlindungan anak. Arah kebijakan dan strategi pembangunan bidang sosial budaya dan kehidupan beragama diprioritaskan sebagaimana tergambar pada diagram berikut.

GAMBAR 2.11
RENCANA PEMBANGUNAN BIDANG SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA



Pengendalian kuantitas penduduk dilakukan melalui tiga fokus prioritas. *Pertama*, revitalisasi program KB melalui: (a) pengembangan dan sosialisasi kebijakan pengendalian penduduk yang responsif gender; (b) pembinaan dan peningkatan kemandirian keluarga berencana; (c) promosi dan penggerakan masyarakat; (d) peningkatan dan pemanfaatan sistem informasi manajemen (SIM) berbasis teknologi informasi; (e) pelatihan, penelitian dan pengembangan program kependudukan dan KB; dan (f) peningkatan kualitas manajemen program. *Kedua*, penyerasian kebijakan pengendalian penduduk, melalui: (a) penyusunan peraturan perundangan pengendalian penduduk; (b) perumusan kebijakan kependudukan yang sinergis antara aspek kuantitas, kualitas dan mobilitas; dan (c) penyediaan sasaran parameter kependudukan yang disepakati semua sektor terkait. *Ketiga*, peningkatan ketersediaan dan kualitas data dan informasi kependudukan yang memadai, akurat dan tepat waktu, melalui: (a) penyediaan data kependudukan yang akurat dan tepat waktu bersumber pada sensus penduduk dan survei kependudukan; (b) penyediaan hasil kajian kependudukan; dan (c) peningkatan cakupan registrasi vital.

Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan dilakukan melalui delapan fokus prioritas. *Pertama*, peningkatan kesehatan ibu, bayi dan balita melalui: (a) peningkatan pelayanan *continuum care* kesehatan ibu dan anak; (b) penyediaan sarana kesehatan yang mampu melaksanakan PONEC dan PONEK; (c) peningkatan pertolongan persalinan oleh tenaga terlatih; (d) peningkatan cakupan kunjungan ibu hamil (K1 dan K4); (e) peningkatan cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani; (f) peningkatan cakupan penanganan komplikasi kebidanan pelayanan nifas; (g) peningkatan cakupan peserta KB aktif yang dilayani sektor pemerintah; (h) pemberian makanan pemulihan pada ibu hamil KEK; (i) peningkatan cakupan neonatal dengan komplikasi yang ditangani; (j) peningkatan cakupan kunjungan bayi; (k) peningkatan cakupan imunisasi tepat waktu pada bayi dan balita; (l) perbaikan kesehatan dan gizi ibu hamil; (m) pemberian ASI eksklusif sampai enam bulan; (n) peningkatan peran posyandu dalam rangka peningkatan kesehatan anak; (o) penyediaan tenaga pelayanan kesehatan bayi dan balita (dokter, bidan dan kader); dan (p) perbaikan kualitas lingkungan dalam rangka penurunan faktor risiko kesehatan bagi bayi dan balita.

Kedua, perbaikan status gizi masyarakat dengan meningkatkan: (a) asupan zat gizi makro (karbohidrat, protein, dan lemak) dan zat gizi mikro (kapsul Vitamin A, zat besi (Fe), garam beryodium, dan zat gizi mikro lainnya) untuk memenuhi angka kecukupan gizi; (b) survailans pangan dan gizi; (c) pengetahuan masyarakat tentang pola hidup sehat dan penerapan gizi seimbang; (d) pemberian ASI eksklusif sampai enam bulan; (e) pemberian Makanan Pendamping ASI (MP-ASI) mulai dari bayi usia 6–24 bulan dan makanan bagi ibu hamil KEK; (f) pemantauan pertumbuhan bayi dengan prioritas usia dua tahun pertama; (g) kegiatan gizi berbasis masyarakat melalui posyandu dan keluarga sadar gizi; (h) fortifikasi; (i) pemberian makanan pemulihan



balita gizi-kurang; (j) penanggulangan gizi darurat; (k) tatalaksana penanganan gizi buruk anak balita (0–59 bulan); dan (l) peningkatan jumlah, kualitas, dan penyebaran tenaga gizi.

Penanganan masalah gizi memerlukan upaya komprehensif dan terkoordinasi, dari mulai proses produksi pangan, pengolahan, distribusi, hingga konsumsi yang cukup nilai gizinya dan aman dikonsumsi. Oleh karena itu, kerjasama lintas bidang dan lintas program terutama pertanian, perdagangan, perindustrian, transportasi, pendidikan, agama, kependudukan, perlindungan anak, ekonomi, kesehatan, pengawasan pangan dan budaya sangat penting dalam rangka sinkronisasi dan integrasi kebijakan perbaikan status gizi masyarakat.

Ketiga, pengendalian penyakit menular serta penyakit tidak menular, diikuti penyehatan lingkungan, dengan meningkatkan: (a) kemampuan pencegahan dan penanggulangan faktor risiko, termasuk imunisasi; (b) surveilans epidemiologi dalam rangka mengembangkan sistem kewaspadaan dini dengan didukung oleh peningkatan jumlah dan kualitas tenaga surveilans; (c) komunikasi, informasi dan edukasi (KIE); (d) penguatan penemuan penderita dan tata laksana kasus; (e) upaya menuju eliminasi penyakit-penyakit terabaikan; (f) kesehatan lingkungan dengan menekankan pada akses terhadap air minum dan sanitasi dasar serta perubahan perilaku *hygiene* dan sanitasi melalui Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) dan pendekatan kabupaten/kota/kawasan sehat; (g) penguatan sistem pengendalian zoonosis secara terpadu; (h) surveilans penyakit tidak menular; (i) promosi dan pemberdayaan masyarakat; dan (j) tata laksana kasus penyakit tidak menular.

Khusus untuk pengendalian penyakit menular, seperti HIV dan AIDS serta penyakit zoonotik terutama flu burung dan influenza tipe A baru yang memiliki dampak besar dalam pembangunan sosial, ekonomi dan penanggulangan kemiskinan, memerlukan upaya komprehensif dan terkoordinasi (*One World One Health/OWOH*) serta kerjasama lintas bidang dan lintas program. Koordinasi dan kerjasama pengendalian HIV dan AIDS antara lain mencakup: kesehatan, pendidikan, pertahanan dan keamanan, transportasi, ilmu pengetahuan dan teknologi, kesejahteraan sosial, perlindungan anak, pemuda, kependudukan, hukum dan hak asasi manusia, komunikasi dan informasi, agama, dan budaya. Sementara itu, koordinasi dan kerjasama untuk pengendalian penyakit zoonotik terutama mencakup kesehatan, peternakan, dan lembaga penelitian, serta kerjasama internasional. Pada keadaan pandemi, diperlukan kerjasama yang lebih luas dengan koordinasi yang lebih kuat di tingkat pusat dan daerah.

Keempat, pengembangan sumberdaya manusia kesehatan, dengan meningkatkan: (a) jumlah, jenis, mutu dan penyebaran sumber daya manusia kesehatan; (b) perencanaan, pengadaan, dan pendayagunaan serta pembinaan dan pengawasan sumber daya manusia kesehatan; (c) penyempurnaan sistem insentif dan penempatan SDM kesehatan di daerah tertinggal, perbatasan dan kepulauan; (d) penguatan

peraturan perundangan dalam aspek standardisasi, akreditasi, sertifikasi kompetensi dan lisensi SDM kesehatan, serta penerapannya dalam praktik kedokteran dan profesi kesehatan lainnya; dan (e) kerjasama antara institusi pendidikan tenaga kesehatan dengan penyedia pelayanan kesehatan dan organisasi profesi.

Kelima, peningkatan ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan, keamanan, mutu dan penggunaan obat serta pengawasan obat dan makanan, melalui: (a) peningkatan ketersediaan, dan keterjangkauan obat, terutama obat esensial generik; (b) peningkatan penggunaan obat rasional; (c) peningkatan keamanan, khasiat dan mutu obat dan makanan yang beredar; (d) pengembangan peraturan dalam upaya harmonisasi standar termasuk dalam mengantisipasi pasar bebas; (e) peningkatan kualitas sarana produksi, distribusi dan sarana pelayanan kefarmasian; (f) peningkatan pelayanan kefarmasian yang bermutu; (g) peningkatan penelitian, pengembangan dan pemanfaatan obat tradisional Indonesia; (h) peningkatan penelitian di bidang obat dan makanan; (i) peningkatan kemandirian di bidang produksi obat, bahan baku obat, obat tradisional, kosmetika dan alat kesehatan; (j) penguatan sistem regulatori pengawasan obat dan makanan; (k) penguatan sistem laboratorium obat dan makanan; (l) peningkatan kemampuan pengujian mutu obat dan makanan; (m) peningkatan sarana dan prasarana laboratorium pengujian; (n) peningkatan penerapan standar internasional laboratorium; (o) penyusunan standar dan pedoman pengawasan obat dan makanan; dan (p) peningkatan pemeriksaan sarana produksi dan distribusi obat dan makanan.

Keenam, pengembangan sistem jaminan pembiayaan kesehatan, melalui: (a) peningkatan efektivitas jaminan kesehatan masyarakat yang menjamin akses dan kualitas pelayanan serta tata kelola administrasi yang akuntabel dan transparan; (b) peningkatan cakupan jaminan kesehatan semesta secara bertahap; dan (c) peningkatan pembiayaan pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin dan golongan rentan (bayi, balita, ibu hamil dan lansia).

Ketujuh, pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan bencana dan krisis kesehatan, dengan meningkatkan: (a) upaya perubahan perilaku dan kemandirian masyarakat untuk hidup sehat; (b) pengembangan sarana dan prasarana serta peraturan dalam rangka mendukung upaya kesehatan berbasis masyarakat; (c) mobilisasi masyarakat dalam rangka pemberdayaan, advokasi, kemitraan dan peningkatan sumber daya pendukung; (d) keterpaduan pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan dengan kegiatan yang berdampak pada *income generating*; (e) evakuasi, perawatan dan pengobatan korban pada daerah bencana; (f) kemitraan bidang kesehatan dengan organisasi masyarakat; (g) kemandirian masyarakat dalam menanggulangi dampak kesehatan akibat bencana; dan (h) pengembangan sistem peringatan dini untuk penyebaran informasi terjadinya wabah dan peningkatan kesiapsiagaan masyarakat.

Kedelapan, peningkatan pelayanan kesehatan primer, sekunder dan tersier, melalui: (a) peningkatan jumlah rumah sakit dan puskesmas serta jaringannya,



terutama pada daerah terpencil, perbatasan, dan kepulauan serta daerah dengan aksesibilitas relatif rendah; (b) peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan dalam bentuk pemenuhan kebutuhan sarana, prasarana, dan ketenagaan; (c) peningkatan kualitas fasilitas pelayanan kesehatan rujukan yang memenuhi standar bertaraf internasional; (d) penyediaan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) bagi pelayanan kesehatan primer di puskesmas; (e) peningkatan utilisasi fasilitas kesehatan, termasuk dengan menjalin kemitraan dengan masyarakat dan swasta; (f) peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan bagi lansia dan penduduk di daerah rawan bencana; dan (g) pengembangan inovasi pelayanan kesehatan sesuai masalah mendesak setempat, misalnya kesehatan perkotaan dan kesehatan kerja.

Kedelapan fokus prioritas tersebut didukung oleh peningkatan kualitas manajemen dan pembiayaan kesehatan, sistem informasi, dan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan, melalui: (a) peningkatan kualitas perencanaan, penganggaran dan pengawasan pembangunan kesehatan; (b) pengembangan perencanaan pembangunan kesehatan berbasis wilayah; (c) penguatan peraturan perundangan pembangunan kesehatan; (d) penataan dan pengembangan surveilans dan sistem informasi kesehatan untuk menjamin ketersediaan data dan informasi kesehatan; (e) pengembangan penguasaan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan dalam bidang kedokteran, kesehatan masyarakat, rancang bangun alat kesehatan dan penyediaan bahan baku obat; (f) peningkatan penapisan teknologi kesehatan dari dalam dan luar negeri yang *cost effective*; (g) peningkatan pembiayaan kesehatan untuk kegiatan preventif dan promotif; (h) peningkatan pembiayaan kesehatan dalam rangka pencapaian sasaran *output* dan *outcome*; (i) peningkatan pembiayaan kesehatan di daerah untuk mencapai indikator SPM; (j) penguatan advokasi untuk peningkatan pembiayaan kesehatan; (k) pengembangan kemitraan dengan penyedia pelayanan masyarakat dan swasta; dan (l) peningkatan efisiensi penggunaan anggaran.

Upaya peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan tersebut juga ditujukan untuk mengurangi kesenjangan status kesehatan dan gizi masyarakat antarwilayah, gender, dan antartingkat sosial ekonomi, melalui: (a) pemihakan kebijakan yang lebih membantu kelompok miskin dan daerah yang tertinggal; (b) pengalokasian sumberdaya yang lebih memihak kepada kelompok miskin dan daerah yang tertinggal; (c) pengembangan instrumen untuk memonitor kesenjangan antarwilayah dan antartingkat sosial ekonomi; (d) peningkatan advokasi dan *capacity building* bagi daerah yang tertinggal; (e) pendekatan pembangunan kesehatan berdimensi wilayah; dan (f) penanggulangan daerah bermasalah kesehatan (PDBK).

Peningkatan akses, kualitas dan relevansi pendidikan menuju terangkatnya kesejahteraan hidup rakyat, kemandirian, keluhuran budi pekerti, dan kemandirian bangsa yang kuat dilakukan melalui sembilan fokus prioritas. **Pertama**, peningkatan kualitas wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun yang merata melalui: (a) penyelenggaraan pendidikan dasar bermutu yang terjangkau bagi semua dalam kerangka pelaksanaan standar pelayanan minimal untuk mencapai standar nasional

pendidikan; (b) pemantapan/rasionalisasi implementasi Bantuan Operasional Sekolah (BOS); (c) peningkatan daya tampung SMP/MTs/ sederajat terutama di daerah terpencil dan kepulauan; (d) penurunan angka putus sekolah dan angka mengulang, peningkatan angka melanjutkan, serta penurunan rata-rata lama penyelesaian pendidikan di berbagai jenjang untuk mendukung peningkatan efisiensi internal pendidikan; (e) penuntasan rehabilitasi ruang kelas SD/MI/ sederajat dan SMP/MTs/ sederajat untuk memenuhi standar pelayanan minimal; (f) peningkatan mutu proses pembelajaran; (g) peningkatan pendidikan inklusif untuk anak-anak cerdas dan berkebutuhan khusus; dan (h) peningkatan kesempatan lulusan SD/MI/ sederajat yang berasal dari keluarga miskin untuk dapat melanjutkan ke SMP/MTs/ sederajat, serta (i) penguatan pelaksanaan proses belajar mengajar dengan iklim sekolah yang mendukung tumbuhnya sikap saling menghargai, sportif, kerjasama, kepemimpinan, kemandirian, partisipatif, kreatif, dan inovatif (*soft skills*), jiwa kewirausahaan, serta memperkuat pendidikan akhlak mulia, kewarganegaraan, dan pendidikan multikultural serta toleransi beragama guna mewujudkan peserta didik yang bermoral, beretika, berbudaya, beradab, toleran, dan memahami keberagaman.

Kedua, peningkatan akses, kualitas, dan relevansi pendidikan menengah, melalui: (a) peningkatan akses pendidikan menengah jalur formal dan non-formal untuk dapat menampung meningkatnya lulusan SMP/MTs/ sederajat sebagai dampak penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun; (b) rehabilitasi gedung-gedung SMA/SMK/ MA/ sederajat; (c) peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan menengah untuk memberikan landasan yang kuat bagi lulusan agar dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang selanjutnya atau memasuki dunia kerja; (d) peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan menengah kejuruan, pendidikan tinggi vokasi, dan pelatihan keterampilan sesuai dengan kebutuhan pembangunan termasuk kebutuhan lokal untuk menghasilkan lulusan yang siap memasuki dunia kerja dan memiliki etos kewirausahaan; (e) harmonisasi pendidikan menengah kejuruan, pendidikan tinggi vokasi dan pelatihan keterampilan untuk membangun sinergi dalam rangka merespons kebutuhan pasar yang dinamis; (f) peningkatan kemitraan antara pendidikan kejuruan, pendidikan tinggi vokasi, dan pelatihan keterampilan dengan dunia industri dalam rangka memperkuat intermediasi dan memperluas kesempatan pemagangan serta penyelarasan pendidikan/pelatihan dengan dunia kerja; (g) peningkatan pendidikan kewirausahaan untuk jenjang pendidikan menengah; dan (h) peningkatan ketersediaan guru SMK yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan pembangunan termasuk kebutuhan lokal.

Ketiga, peningkatan kualitas, relevansi, dan daya saing pendidikan tinggi, melalui: (a) peningkatan akses dan pemerataan pendidikan tinggi dengan memperhatikan keseimbangan antara jumlah program studi sejalan dengan tuntutan kebutuhan pembangunan dan masyarakat serta daerah; (b) penguatan otonomi dan manajemen pendidikan tinggi dalam rangka membangun universitas riset (*research university*) menuju terwujudnya universitas kelas dunia (*world class university*); (c)



penataan program studi dan bidang keilmuan yang fleksibel memenuhi kebutuhan pembangunan; (d) peningkatan ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana pendidikan tinggi, seperti perpustakaan dan laboratorium yang sesuai dengan kebutuhan program studi; (e) pengembangan dan pelaksanaan *road map* penelitian sesuai dengan kebutuhan pembangunan untuk mendukung terwujudnya perguruan tinggi sebagai pengembangan dan penelitian iptek; (f) peningkatan kualifikasi dosen melalui pendidikan S2/S3 baik di dalam maupun di luar negeri; (g) penguatan kualitas dosen melalui peningkatan intensitas penelitian dan *academic recharging*; (h) penguatan sistem insentif bagi dosen dan peneliti untuk mempublikasikan hasil penelitian dalam jurnal internasional dan mendapatkan paten; (i) penguatan kemitraan perguruan tinggi, lembaga litbang, dan industri, termasuk lembaga pendidikan internasional, dalam penguatan kelembagaan perguruan tinggi sebagai pusat pengembangan dan penelitian iptek; (j) peningkatan pendidikan kewirausahaan, termasuk *technopreneur* bagi dosen dan mahasiswa dengan menjalin kerjasama antara institusi pendidikan dan dunia usaha; dan (k) pemberian beasiswa perguruan tinggi untuk siswa SMA/SMK/MA yang berprestasi dan kurang mampu.

Keempat, peningkatan profesionalisme dan pemerataan distribusi guru dan tenaga kependidikan, melalui: (a) peningkatan kualifikasi akademik, sertifikasi, evaluasi, pelatihan, pendidikan, dan penyediaan berbagai tunjangan guru; (b) penguatan kemampuan guru, termasuk kepala sekolah dan pengawas sekolah, dalam menjalankan paradigma pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif, *entrepreneurial*, dan menyenangkan; (c) peningkatan kompetensi guru melalui pengembangan profesional berkelanjutan (*continuous professional development*); (d) pemberdayaan peran kepala sekolah sebagai *manager* sistem pendidikan yang unggul; (e) revitalisasi peran pengawas sekolah sebagai entitas *quality assurance*; (f) peningkatan kapasitas dan kualitas lembaga pendidik tenaga kependidikan (LPTK) untuk mencetak guru yang berkualitas secara masif, termasuk dalam menyelenggarakan *pre-service training* yang bermutu; (g) peningkatan pengawasan pendirian LPTK dan pengendalian mutu penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan guru; (h) peningkatan efisiensi, efektivitas, pengelolaan, dan pemerataan distribusi guru; dan (i) penyediaan tenaga pendidik di daerah terpencil, perbatasan, dan kepulauan sesuai dengan standar pelayanan minimal.

Kelima, peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan non-formal, melalui: (a) penguatan kapasitas lembaga penyelenggara pendidikan non-formal; (b) peningkatan pendidikan kecakapan hidup untuk warga negara usia sekolah yang putus sekolah atau tidak melanjutkan sekolah dan bagi warga usia dewasa; (c) peningkatan pengetahuan dan kecakapan keorangtunaan (*parenting education*) dan *homeschooling* serta pendidikan sepanjang hayat; dan (d) peningkatan keberaksaraan penduduk yang diikuti dengan upaya pelestarian kemampuan keberaksaraan dan peningkatan minat baca. **Keenam**, peningkatan minat dan budaya gemar membaca masyarakat, melalui: (a) penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan sebagai pusat sumber belajar masyarakat; (b) revitalisasi perpustakaan; (c) peningkatan ketersediaan layanan

perpustakaan secara merata; (d) peningkatan kualitas dan keberagaman koleksi perpustakaan; (e) peningkatan promosi gemar membaca dan pemanfaatan perpustakaan; dan (f) pengembangan kompetensi dan profesionalitas tenaga perpustakaan. **Ketujuh**, peningkatan akses dan kualitas pendidikan anak usia dini, yang holistik dan integratif untuk mendukung tumbuh kembang secara optimal sehingga memiliki kesiapan untuk memasuki jenjang pendidikan selanjutnya.

Kedelapan, peningkatan kualitas pendidikan agama dan keagamaan, melalui peningkatan jumlah dan kapasitas guru, kapasitas penyelenggara, pemberian bantuan dan fasilitasi penyelenggaraan pendidikan, serta pengembangan kurikulum dan metodologi pembelajaran pendidikan agama dan keagamaan yang efektif sesuai dengan Standar Pendidikan Nasional (SNP) paling lambat pada tahun 2013. **Kesembilan**, pemantapan pelaksanaan sistem pendidikan nasional, dengan meningkatkan: (a) percepatan penyusunan peraturan perundangan untuk mendukung pemantapan pelaksanaan sistem pendidikan nasional; (b) penataan pelaksanaan pendidikan yang diselenggarakan oleh berbagai kementerian/lembaga dan pemerintah daerah secara menyeluruh sesuai dengan peraturan perundangan; dan (c) pengembangan kurikulum baik nasional maupun lokal yang disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, budaya, dan seni serta perkembangan global, regional, nasional, dan lokal termasuk pendidikan agama, pengembangan kinestetika dan integrasi pendidikan kecakapan hidup untuk meningkatkan etos kerja dan kemampuan kewirausahaan peserta didik dalam rangka mendukung pendidikan berwawasan pembangunan berkelanjutan.

Selain itu, kesembilan fokus prioritas tersebut juga didukung oleh kebijakan sebagai berikut. **Pertama**, peningkatan efisiensi dan efektivitas manajemen pelayanan pendidikan melalui: (a) pemantapan pelaksanaan desentralisasi pendidikan; (b) pengelolaan pendanaan di tingkat pusat dan daerah yang transparan, efektif dan akuntabel serta didukung sistem pendanaan yang andal; (c) peningkatan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan, antara lain, dalam bentuk komite sekolah; (d) peningkatan kapasitas pemerintah pusat dan daerah untuk memperkuat pelaksanaan desentralisasi pendidikan termasuk di antaranya dalam bentuk dewan pendidikan di tingkat kabupaten/kota; (e) peningkatan kapasitas satuan pendidikan untuk mengoptimalkan pelaksanaan otonomi pendidikan, termasuk manajemen berbasis sekolah (MBS); dan (f) konsolidasi sistem informasi dan hasil penelitian dan pengembangan pendidikan untuk dimanfaatkan dalam proses pengambilan keputusan, memperkuat monitoring, evaluasi, dan pengawasan pelaksanaan program-program pembangunan pendidikan. **Kedua**, penguatan sistem evaluasi, akreditasi dan sertifikasi termasuk sistem pengujian dan penilaian pendidikan dalam rangka penilaian kualitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan di tingkat satuan pendidikan, kabupaten/kota, provinsi, dan nasional. **Ketiga**, penyusunan peraturan perundang-undangan yang menjamin tercapainya pendidikan dasar sembilan tahun yang bermutu dan terjangkau. **Keempat**, peningkatan ketersediaan dan kualitas



sarana dan prasarana pendidikan seperti laboratorium, perpustakaan, dan didukung oleh ketersediaan buku-buku mata pelajaran yang berkualitas dan murah, untuk memenuhi standar pelayanan minimal termasuk di daerah pemekaran baru. *Kelima*, peningkatan penerapan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di bidang pendidikan termasuk penyediaan internet ber-*content* pendidikan mulai jenjang pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi. *Keenam*, peningkatan karakter bangsa peserta didik termasuk internalisasi nilai-nilai budaya ke dalam proses pembelajaran, kurikulum, dan kegiatan ekstrakurikuler, serta peningkatan mutu bahasa Indonesia sebagai bahasa ilmu pengetahuan teknologi dan seni serta bahasa perhubungan luas antara bangsa.

Upaya peningkatan akses dan kualitas pelayanan pendidikan tersebut juga ditujukan untuk mengurangi kesenjangan taraf pendidikan antarwilayah, gender, dan antartingkat sosial ekonomi dengan meningkatkan: (a) pemihakan pada siswa dan mahasiswa yang berasal dari keluarga miskin melalui pemberian bantuan beasiswa bagi siswa dan mahasiswa miskin; (b) pemihakan kebijakan bagi daerah dan satuan pendidikan yang tertinggal (*underprivileged*); (c) pengalokasian sumberdaya yang lebih memihak kepada daerah dan satuan pendidikan yang tertinggal; (d) pemihakan kebijakan pendidikan yang responsif gender di seluruh jenjang pendidikan; (e) pengembangan instrumen untuk memonitor kesenjangan antarwilayah, gender, dan antartingkat sosial ekonomi; dan (f) peningkatan advokasi dan *capacity building* bagi daerah dan satuan pendidikan yang tertinggal.

Peningkatan partisipasi pemuda, budaya dan prestasi olahraga dilakukan melalui dua fokus prioritas. ***Pertama***, peningkatan partisipasi dan peran aktif pemuda dalam berbagai bidang pembangunan melalui: (a) peningkatan *character building*, revitalisasi, dan konsolidasi gerakan kepemudaan; (b) revitalisasi gerakan pramuka; (c) pengembangan penguasaan teknologi, jiwa kewirausahaan, dan kreativitas pemuda; (d) penyadaran pemuda; (e) pemberdayaan pemuda; (f) pengembangan kepemimpinan pemuda; (g) pengembangan kewirausahaan pemuda; (h) pengembangan kepeloporan/kreativitas pemuda; (i) peningkatan koordinasi dan kemitraan kepemudaan; (j) pengembangan prasarana dan sarana kepemudaan; (k) pemberdayaan organisasi kepemudaan; (l) peningkatan peran serta masyarakat; dan (m) pengembangan penghargaan kepemudaan. Peningkatan partisipasi dan peran aktif pemuda dilaksanakan sesuai karakteristik pemuda yang memiliki semangat kejuangan, kesukarelaan, tanggung jawab, dan ksatria serta memiliki sikap kritis, idealis, inovatif, progresif, dinamis, reformis dan futuristik tanpa meninggalkan akar budaya Indonesia yang tercermin dalam kebhinekaan.

Kedua, peningkatan budaya dan prestasi olahraga di tingkat regional dan internasional, melalui: (a) peningkatan prestasi pada SEA Games tahun 2011; (b) peningkatan perolehan medali di Asian Games tahun 2010 dan Olimpiade tahun 2012; (c) penyelenggaraan olahraga pendidikan, olahraga rekreasi dan olahraga prestasi; (d) pembinaan dan pengembangan olahraga; (e) pengelolaan keolahragaan; (f)

penyelenggaraan kejuaraan keolahragaan; (g) pembinaan dan pengembangan pelaku olahraga; (h) pembinaan, pengembangan dan pengawasan olahraga profesional; (i) peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana olahraga; (j) pengembangan iptek keolahragaan; (k) peningkatan peran serta masyarakat; (l) pengembangan kerjasama dan informasi keolahragaan; (m) pembinaan dan pengembangan industri olahraga; (n) pengembangan standar nasional keolahragaan; (o) penyelenggaraan akreditasi dan sertifikasi olahraga; (p) pencegahan dan pengawasan terhadap doping; dan (q) pemberian penghargaan keolahragaan.

Selain itu, fokus prioritas pembangunan kepemudaan dan keolahragaan di atas didukung oleh: (a) peningkatan kualitas manajemen dan pembiayaan kepemudaan dan keolahragaan; (b) sistem informasi dan pelayanan publik; dan (c) peningkatan koordinasi dan kerjasama lintas bidang, lintas sektor, lintas program, lintas pelaku, dan lintas kementerian/lembaga (K/L) dengan memperhatikan kesetaraan gender dan pembangunan yang berkelanjutan.

Peningkatan kualitas kehidupan beragama dilakukan melalui empat fokus prioritas. *Pertama*, peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan agama melalui: (a) peningkatan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai luhur yang terkandung di dalam ajaran agama; (b) peningkatan wawasan keagamaan yang toleran dan selaras dengan wawasan kebangsaan, Hak Asasi Manusia (HAM) dan gender, serta kebhinekaan; (c) peningkatan motivasi dan partisipasi umat beragama dalam pembangunan nasional; (d) peningkatan wawasan keagamaan masyarakat untuk mengurangi berbagai aliran sempalan dan tindakan kekerasan yang mengatasnamakan agama; (e) peningkatan ketahanan umat beragama terhadap eksekusi negatif ideologi-ideologi yang tidak sesuai dengan nilai luhur bangsa; (f) peningkatan upaya mewujudkan kesalehan sosial sejalan dengan kesalehan ritual; (g) pengembangan pusat kajian keagamaan dan sumber belajar masyarakat; (h) peningkatan pemanfaatan sumber-sumber informasi keagamaan dan perpustakaan rumah ibadah; (i) penguatan peran media massa dan teknologi informasi sebagai wahana internalisasi nilai-nilai agama; dan (j) penguatan peran agama dalam pembentukan karakter dan peradaban bangsa. *Kedua*, peningkatan kualitas kerukunan umat beragama, melalui: (a) pembentukan dan peningkatan efektivitas forum kerukunan umat beragama; (b) pengembangan sikap dan perilaku keberagamaan yang inklusif dan toleran; (c) penguatan kapasitas masyarakat dalam menyampaikan dan mengartikulasikan aspirasi-aspirasi keagamaan melalui cara-cara damai; (d) peningkatan dialog dan kerjasama intern dan antarumat beragama, dan pemerintah dalam pembinaan kerukunan umat beragama; (e) peningkatan koordinasi antarinstansi/lembaga pemerintah dalam upaya penanganan konflik terkait isu-isu keagamaan; (f) pengembangan wawasan multikultur bagi guru-guru agama, penyuluh agama, siswa, mahasiswa dan para pemuda calon pemimpin agama; (g) peningkatan peran Indonesia dalam dialog lintas agama di dunia internasional; dan (h) penguatan peraturan perundang-undangan terkait kehidupan keagamaan, seperti perlunya penyusunan undang-undang tentang perlindungan dan kebebasan beragama.



Ketiga, peningkatan kualitas pelayanan kehidupan beragama, melalui: (a) peningkatan pengelolaan dan fungsi rumah ibadah; (b) peningkatan mutu pelayanan dan pengelolaan dana sosial keagamaan (zakat, wakaf, infak, sedekah, dana persembahan kasih/dana kolekte, dana punia, dan dana paramita serta dana ibadah sosial lainnya); (c) peningkatan kapasitas lembaga-lembaga sosial keagamaan; (d) peningkatan jaringan dan sistem informasi lembaga sosial keagamaan; (e) pengembangan berbagai kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang secara jelas menjabarkan kewenangan dan kewajiban pemerintah dalam memberikan perlindungan atas hak beragama masyarakat; dan (f) penerapan sistem pemantauan dan evaluasi pembangunan bidang agama yang berkelanjutan dan efektif; (g) reformasi birokrasi; (h) penyiapan laporan keuangan dengan opini wajar tanpa pengecualian; dan (i) penguatan struktur organisasi instansi pusat dan instansi vertikal yang sesuai dengan tuntutan perkembangan.

Keempat, pelaksanaan ibadah haji yang tertib dan lancar paling lambat pada 2010, melalui: (a) peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji sesuai standar pelayanan minimal dalam rangka memperoleh sertifikat ISO 9000:2001; (b) pemantapan penerapan dan pemanfaatan sistem informasi haji terpadu (Siskohat); (c) penyediaan jaringan Siskohat di seluruh kabupaten/kota; (d) peningkatan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan ibadah haji; (e) pemantapan landasan peraturan perundang-undangan tentang profesionalisme penyelenggaraan ibadah haji; dan (f) penyiapan draft undang-undang tentang pengelolaan dana haji.

Selain itu, keempat fokus prioritas pembangunan bidang agama di atas juga didukung oleh: (a) peningkatan kualitas manajemen dan tata kelola pembangunan bidang agama; (b) peningkatan sistem informasi dan pelayanan publik; (c) peningkatan penelitian dan pengembangan pembangunan bidang agama; (d) peningkatan pendidikan dan pelatihan; dan (e) peningkatan koordinasi dan kerjasama lintas bidang, lintas sektor, lintas program, lintas pelaku, dan lintas kementerian/lembaga (K/L).

Penguatan jati diri bangsa dan pelestarian budaya dilakukan melalui empat fokus prioritas. **Pertama**, penguatan jati diri dan karakter bangsa yang berbasis pada keragaman budaya, dengan meningkatkan: (a) pembangunan karakter dan pekerti bangsa yang dilandasi oleh nilai-nilai kearifan lokal; (b) pemahaman tentang kesejarahan dan wawasan kebangsaan; (c) pelestarian, pengembangan dan aktualisasi nilai dan tradisi dalam rangka memperkaya dan memperkuat khasanah budaya bangsa; (d) pemberdayaan masyarakat adat; dan (e) pengembangan promosi kebudayaan dengan pengiriman misi kesenian, pameran, dan pertukaran budaya. **Kedua**, peningkatan apresiasi terhadap keragaman serta kreativitas seni dan budaya, melalui (a) peningkatan perhatian dan kesertaan pemerintah dalam program-program seni budaya yang diinisiasi oleh masyarakat dan mendorong berkembangnya apresiasi terhadap kemajemukan budaya; (b) penyediaan sarana yang memadai bagi pengembangan, pendalaman dan pagelaran seni budaya di kota besar dan ibu kota kabupaten selambat-lambatnya Oktober 2012; (c) pengembangan kesenian seperti seni

rupa, seni pertunjukan, seni media, dan berbagai industri kreatif yang berbasis budaya; (d) pemberian insentif kepada para pelaku seni dalam pengembangan kualitas seni dan budaya dalam bentuk fasilitasi, pendukung dan penghargaan; dan (e) pengembangan perfilman nasional yang adaptif dan interaktif terhadap nilai-nilai baru yang positif.

Ketiga, peningkatan kualitas perlindungan, penyelamatan, pengembangan dan pemanfaatan warisan budaya, melalui: (a) penetapan dan pembentukan pengelolaan terpadu untuk pengelolaan cagar budaya, revitalisasi museum dan perpustakaan di seluruh Indonesia sebelum Oktober 2011; (b) perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan peninggalan purbakala, termasuk peninggalan bawah air; (c) pengembangan permuseuman nasional sebagai sarana edukasi, rekreasi, serta pengembangan kesejarahan dan kebudayaan; dan (d) penelitian dan pengembangan arkeologi nasional; **Keempat**, pengembangan sumber daya kebudayaan, melalui (a) pengembangan kapasitas nasional untuk pelaksanaan penelitian, penciptaan dan inovasi dan memudahkan akses dan penggunaannya oleh masyarakat luas di bidang kebudayaan (b) peningkatan jumlah, pendayagunaan, serta kompetensi dan profesionalisme SDM kebudayaan; (c) peningkatan pendukung sarana dan prasarana untuk pengembangan seni dan budaya masyarakat; (d) peningkatan penelitian dan pengembangan kebudayaan; (e) peningkatan kualitas informasi dan basisdata kebudayaan; dan (f) pengembangan kemitraan antara pemerintah pusat dan daerah, sektor terkait, masyarakat dan swasta.

Selain itu, fokus prioritas pembangunan kebudayaan di atas didukung oleh peningkatan koordinasi dan kerjasama antara pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha, serta peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan kebudayaan, dengan tetap memperhatikan kesetaraan gender dan pembangunan yang berkelanjutan.

Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesejahteraan sosial dilakukan melalui empat fokus prioritas. *Pertama*, peningkatan Program Keluarga Harapan (PKH). *Kedua*, peningkatan pelayanan dan rehabilitasi sosial. *Ketiga*, peningkatan bantuan sosial. *Keempat*, pemberdayaan fakir miskin dan komunitas adat terpencil (KAT). Keempat fokus prioritas tersebut juga didukung oleh: (a) peningkatan kualitas rancangan dan pengelolaan program; (b) penyempurnaan kriteria, proses penargetan, serta proses seleksi penerima bantuan sosial; (c) peningkatan jumlah dan perluasan cakupan sasaran program; (d) penataan kelembagaan untuk pengelolaan program secara efektif dan efisien; (e) peningkatan kemampuan dan kualitas lembaga pendidikan dan penelitian; dan (f) pengembangan sistem informasi manajemen yang berkualitas.

Peningkatan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak dilakukan melalui dua fokus prioritas. *Pertama*, peningkatan kapasitas kelembagaan PUG dan pemberdayaan perempuan melalui penerapan strategi PUG, termasuk mengintegrasikan perspektif gender ke dalam siklus perencanaan dan penganggaran di seluruh kementerian dan lembaga. Fokus prioritas ini bertujuan untuk



mendukung peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan dalam pembangunan, serta peningkatan perlindungan perempuan terhadap berbagai tindak kekerasan. *Kedua*, peningkatan kapasitas kelembagaan perlindungan anak, melalui: (a) penyusunan dan harmonisasi peraturan perundang-undangan terkait perlindungan anak; (b) peningkatan kapasitas pelaksana perlindungan anak; (c) peningkatan penyediaan data dan informasi perlindungan anak; dan (d) peningkatan koordinasi dan kemitraan antarpemangku kepentingan terkait pemenuhan hak-hak anak. Fokus prioritas tersebut bertujuan untuk meningkatkan kualitas tumbuh kembang dan kelangsungan hidup anak, serta meningkatkan perlindungan anak dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Selain itu, pelaksanaan peningkatan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak tersebut juga didukung oleh: (a) peningkatan kualitas manajemen dan tata kelola pembangunan bidang kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak; (b) sistem manajemen data dan informasi tentang gender dan anak; dan (c) peningkatan koordinasi dan kerjasama lintas bidang, lintas sektor, lintas program, lintas pelaku, dan lintas kementerian/lembaga (K/L).

**RENCANA TINDAK PRIORITAS BIDANG
SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA**

BIDANG PEMBANGUNAN : SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA
PRIORITAS BIDANG : Pengendalian Kuantitas Penduduk

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010 - 2014 (Rp. Miliar)
				2010	2014			
1.	Revitalisasi Program Keluarga Berencana	Tercapainya penduduk tumbuh seimbang	<i>Contraceptive Prevalence Rate/CPR (%)</i>	57,4	65,0			8.086,7
			1. Jumlah peserta KB baru /PB (juta)	7,1	36,7 ^{ki)}			
			2. Jumlah peserta KB aktif/PA (juta)	26,7	29,8			
			3. Jumlah peserta KB baru mandiri (ribu)	3,4	17,3 ^{ki)}			
			4. Persentase peserta KB aktif mandiri	48,4	51,0			
			5. Persentase peserta KB baru MKJP	12,1	64,3 ^{ki)}			
			6. Persentase peserta KB aktif MKJP	24,2	27,5			

BIDANG PEMBANGUNAN : SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA
PRIORITAS BIDANG : Pengendalian Kuantitas Penduduk

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010 - 2014 (Rp. Miliar)
				2010	2014			
			7. Persentase peserta KB baru Pria	3,6	5,0			
1.1	Pengembangan kebijakan dan pembinaan kesertaan ber-KB	Meningkatnya pembinaan, kesertaan, dan kemandirian ber-KB melalui 23.500 klinik KB pemerintah dan swasta	1. Persentase NSPK tentang pembinaan kemandirian ber-KB	10	100	Program Kependudukan dan Keluarga Berencana	BKKBN	4.378,2
			2. Jumlah klinik KB pemerintah dan swasta yang melayani KB	23.500	23.500			
			3. Jumlah peserta KB baru miskin (KPS dan KS-1) dan rentan lainnya yang mendapatkan pembinaan dan alokon gratis melalui 23.500 klinik KB pemerintah dan swasta (juta)	3,75	19,46 ^{k)}			
			4. Jumlah peserta KB aktif miskin (KPS dan KS-1) dan rentan lainnya yang mendapatkan pembinaan dan alokon gratis melalui 23.500 klinik KB pemerintah dan swasta (juta)	11,9	62,5 ^{k)}			
			5. Persentase komplikasi berat yang dilayani	0,12	0,11			
			6. Persentase kegagalan KB yang dilayani	0,03	0,03			
			7. Jumlah pencabutan implant yang dilayani (kasus)	297.600	1.831.941 ^{k)}			

BIDANG PEMBANGUNAN : SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA
PRIORITAS BIDANG : Pengendalian Kuantitas Penduduk

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010 - 2014 (Rp. Miliar)
				2010	2014			
			8. Persentase kab/kota yang menyediakan sarana dan prasarana pelayanan KB	40	90			
			9. Jumlah klinik KB pemerintah dan swasta yang mendapat dukungan sarana prasarana	4.700	23.500 ^{ki)}			
1.2	Penguatan sumberdaya penyelenggara program KB	Meningkatnya kapasitas sumberdaya penyelenggara program KB di 23.500 klinik KB pemerintah dan swasta dalam rangka pembinaan, kesertaan, dan kemandirian ber-KB	1. Persentase tenaga pelayanan KB terlatih di 23.500 klinik KB pemerintah dan swasta	35	100	Program Kependudukan dan Keluarga Berencana	BKKBN	646,9
			2. Persentase klinik KB yang melayani KB sesuai SOP (dari 23.500 klinik KB pemerintah dan swasta)	20	85			
1.3	Penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja (PKBR)	Meningkatnya PSP remaja tentang PKBR	1. Jumlah kebijakan tentang PKBR	1	5 ^{ki)}	Program Kependudukan dan Keluarga Berencana	BKKBN	205,3
			2. Persentase pengetahuan remaja tentang :					
			a. Kesehatan reproduksi remaja	50	62			
			b. HIV/AIDS	64	76			
			c. Perencanaan kehidupan berkeluarga	10	30			
			3. Jumlah pelatih PKBR dilatih	-	205 ^{pi)}			
			4. Persentase kab/kota yang mempunyai kebijakan program PKBR	20	100			
			5. Persentase mitra kerja yang melaksanakan kegiatan PKBR	20	100			
			6. Jumlah center of excellent PKBR (per provinsi)	1	15 ^{ki)}			
			7. Jumlah PIK remaja/ mahasiswa yang dibentuk dan dibina	9.373	63.977 ^{ki)}			

BIDANG PEMBANGUNAN : SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA
PRIORITAS BIDANG : Pengendalian Kuantitas Penduduk

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010 - 2014 (Rp. Miliar)
				2010	2014			
1.4	Peningkatan kemandirian ber-KB keluarga Pra-S dan KS-1	Meningkatnya pembinaan dan kemandirian ber-KB keluarga Pra-S dan KS-1	1. Jumlah kebijakan kegiatan pemberdayaan ekonomi keluarga peserta KB	3	6 ^{ki}	Program Kependudukan dan Keluarga Berencana	BKKBN	135,7
			2. Jumlah PUS anggota kelompok usaha ekonomi produktif yang menjadi peserta KB mandiri	22.000	110.000			
			3. Persentase Kab/kota yang mempunyai kebijakan pemberdayaan ekonomi keluarga peserta KB	20	75			
			4. Jumlah mitra kerja yang memberikan bantuan modal dan pembinaan kewirausahaan kepada kelompok usaha ekonomi produktif	34	170 ^{ki}			
			5. Jumlah tenaga pengelola kegiatan pemberdayaan ekonomi keluarga peserta KB yang dilatih	-	99 ^{ki}			
			6. Jumlah mitra kerja yang menjadi pendamping kelompok usaha ekonomi produktif	3	15 ^{ki}			

BIDANG PEMBANGUNAN : SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA
PRIORITAS BIDANG : Pengendalian Kuantitas Penduduk

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010 - 2014 (Rp. Miliar)
				2010	2014			
1.5	Pembinaan ketahanan keluarga	<p>1. Meningkatnya ketahanan keluarga dalam rangka peningkatan kesertaan, pembinaan, dan kemandirian ber-KB bagi PUS anggota poktan</p> <p>2. Meningkatnya ketrampilan keluarga dalam pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak, pembinaan remaja, serta peningkatan kualitas hidup lansia</p>	<p>1. Jumlah kebijakan kegiatan pembinaan ketahanan keluarga</p> <p>2. Jumlah mitra kerja yang melaksanakan pembinaan dan pendampingan ketahanan keluarga</p> <p>3. Persentase kab/kota yang mempunyai kebijakan pembinaan ketahanan keluarga</p> <p>4. Jumlah tenaga pengelola pembinaan ketahanan keluarga yang dilatih</p> <p>5. Jumlah tenaga pelatih pembinaan ketahanan keluarga yang dilatih</p> <p>6. Jumlah <i>prototype</i> BKB-Kit yang diproduksi</p> <p>7. Persentase kabupaten/kota yang memperoleh dan mendayagunakan <i>prototype</i> BKB-Kit</p>	4	8 ^{ki}	Program Kependudukan dan Keluarga Berencana	BKKBN	222,6
				2	20 ^{ki}			
				50	75			
				-	1.341 ^{ki}			
				-	1.644 ^{ki}			
				1	5 ^{ki}			
				20	20			

BIDANG PEMBANGUNAN : SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA
PRIORITAS BIDANG : Pengendalian Kuantitas Penduduk

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010 - 2014 (Rp. Miliar)
				2010	2014			
1.6	Peningkatan advokasi kepada stakeholder	Meningkatnya komitmen stakeholders terhadap pengendalian penduduk dan program KB	1. Jumlah kebijakan tentang advokasi kepada <i>stakeholders</i> yang dikeluarkan	-	2 ^{ki}	Program Kependudukan dan Keluarga Berencana	BKKBN	281,8
			2. Persentase stakeholder dan mitra kerja mempunyai kebijakan Kependudukan dan KB	20	80			
1.7	Peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi pengendalian penduduk dan KB	Meningkatnya pengetahuan, sikap dan perilaku masyarakat tentang pengendalian penduduk dan KB	1. Jumlah kebijakan tentang komunikasi, informasi, dan edukasi	-	2 ^{ki}	Program Kependudukan dan Keluarga Berencana	BKKBN	958,8
			2. Persentase media dan materi KIE yang diproduksi	-	100			
			3. Persentase PUS, WUS, dan remaja yg mengetahui informasi KKB melalui media massa (cetak dan elektronik) dan media luar ruang	95	95			
			4. Persentase media cetak dan elektronik yang menayangkan informasi KKB	-	100			
			5. Jumlah media luar ruang yang menayangkan informasi KKB	-	328 ^{ki}			

BIDANG PEMBANGUNAN : SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA
PRIORITAS BIDANG : Pengendalian Kuantitas Penduduk

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010 - 2014 (Rp. Miliar)
				2010	2014			
			6. Persentase klinik KB dan mitra kerja yang mendapatkan media dan materi KIE	-	287 ^{ki)}			
			7. Jumlah PLKB yang mendapatkan KIE-Kit	-	1.000 ^{ki)}			
			8. Jumlah petugas Mupen yang dilatih	-	1.584 ^{ki)}			
			9. Persentase kab/kota yang mendapatkan sarana prasarana KIE	-	100			
1.8	Pengembangan media komunikasi	Tersedia dan dimanfaatkannya media dan materi KIE pengendalian penduduk dan KB	1. Jumlah kebijakan tentang publikasi kependudukan dan KB	-	2 ^{ki)}	Program Kependudukan dan Keluarga Berencana	BKKBN	281,8
			2. Jumlah prototype yang diproduksi	-	3 ^{ki)}			
			3. Persentase stakeholders mendayagunakan prototype bahan dan media advokasi dan KIE Kependudukan dan KB	-	70			

BIDANG PEMBANGUNAN : SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA
PRIORITAS BIDANG : Pengendalian Kuantitas Penduduk

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010 - 2014 (Rp. Miliar)
				2010	2014			
			4. Persentase mitra kerja mendayagunakan prototype bahan dan media advokasi dan KIE Kependudukan dan KB	-	100			
			5. Jumlah publikasi yang disusun	12	60 ^{ki}			
			6. Indeks kepuasan pelanggan terhadap publikasi (dari skala 1-4)	3	3			
1.9	Peningkatan kemitraan dengan lintas sektor dan pemerintah daerah	Meningkatnya komitmen dan peran serta lintas sektor dan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan program KKB	1. Jumlah kebijakan kemitraan lintas sektor dan pemerintah daerah	1	7 ^{ki}	Program Kependudukan dan Keluarga Berencana	BKKBN	266,3
			2. Jumlah kab/kota yang membentuk BKKBD	-	435 ^{ki}			
			3. Persentase kab/kota mempunyai kebijakan program KKB dalam rencana pembangunan daerah	100	100			
			4. Persentase kab/kota melaksanakan NSPK	-	75			

BIDANG PEMBANGUNAN : SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA
PRIORITAS BIDANG : Pengendalian Kuantitas Penduduk

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010 - 2014 (Rp. Miliar)
				2010	2014			
1.10	Peningkatan kemitraan dengan sektor swasta, LSM, dan masyarakat	Meningkatnya peran serta LSM, swasta, dan masyarakat dalam penyelenggaraan program KKB	1. Jumlah MOU baru	2	10 ^{ki}	Program Kependudukan dan Keluarga Berencana	BKKBN	269,8
			2. Persentase MOU yang operasional	25	65			
			3. Persentase pelatih IMP yang terlatih	20	80			
			4. Persentase toga/toma/toda yang terlatih	-	75			
			5. Persentase motivator swasta dan LSM yang terlatih	-	75			
			6. Jumlah tenaga lini lapangan KB (PLKB/PKB) yang terlatih:					
			1. Latihan dasar umum (LDU)	1.065	3.750 ^{ki}			
			2. <i>Refreshing</i>	1.350	11.000 ^{ki}			
	3.018	12.875 ^{ki}						
1.11	Penyediaan data dan informasi Program Kependudukan dan KB berbasis TI	Tersedianya data dan informasi Program Kependudukan dan KB berbasis TI	1. Jumlah kebijakan yang berkaitan dengan penyediaan data dan informasi	1	4 ^{ki}	Program Kependudukan dan Keluarga Berencana	BKKBN	165,6
			2. Persentase cakupan laporan:					
			1. Provinsi	100	100			
			2. Kab/Kota	85	85			
	3. Jumlah data dan informasi yang tersedia tepat waktu	918	4.590 ^{ki}					

BIDANG PEMBANGUNAN : SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA
PRIORITAS BIDANG : Pengendalian Kuantitas Penduduk

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010 - 2014 (Rp. Miliar)
				2010	2014			
1.12	Peningkatan kualitas analisis data dan informasi manajemen program kependudukan dan KB	Tersedia dan meningkatnya kualitas analisis data dan informasi manajemen program kependudukan dan KB	1. Jumlah kebijakan analisis dan evaluasi pengelolaan kependudukan dan KB	2	5 ^{ki}	Program Kependudukan dan Keluarga Berencana	BKKBN	84,7
			2. Persentase hasil analisis dan evaluasi yang dimanfaatkan dalam pengelolaan kependudukan dan KB	50	100			
			3. Jumlah pelaporan pelaksanaan program	72	360 ^{ki}			
1.13	Peningkatan pelayanan informasi dan dokumentasi Program KKB berbasis TI	Meningkatnya pelayanan informasi dan dokumentasi Program KKB bagi stakeholders	1. Jumlah kebijakan pelayanan informasi dan dokumentasi Program KKB berbasis TI	2	5 ^{ki}	Program Kependudukan dan Keluarga Berencana	BKKBN	82,3
			2. Jumlah publikasi berbahasa Indonesia	6	42 ^{ki}			
			3. Jumlah publikasi luar negeri	2	14 ^{ki}			
			4. Indeks kepuasan stakeholders terhadap hasil publikasi (dari skala 1-4)	3	3			

BIDANG PEMBANGUNAN : SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA
PRIORITAS BIDANG : Pengendalian Kuantitas Penduduk

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010 - 2014 (Rp. Miliar)
				2010	2014			
			5. Frekuensi pemutakhiran data dan informasi di website	12	12			
			6. Persentase PKB yang mendapatkan pelatihan e-learning	7	30			
			7. Persentase PKB yang mendapatkan pelatihan e-learning dan mengakses e-learning	20	80			
1.14	Pengembangan teknologi informasi komunikasi	Tersedia dan meningkatnya sarana prasarana dan teknologi informasi komunikasi program kependudukan dan KB	1. Jumlah kebijakan STIK Kependudukan dan KB	2	4 ^{ki}	Program Kependudukan dan Keluarga Berencana	BKKBN	107,0
			2. Jumlah aplikasi STIK Kependudukan dan KB	4	20 ^{ki}			
			3. Jumlah pengembangan/ penyediaan infrastruktur TIK	1	5 ^{ki}			
			4. Persentase cakupan jejaring STIK Kependudukan dan KB sampai kab/kota	15	80			
			5. Indeks kepuasan pelanggan (dari skala 1-4)	3	3			

BIDANG PEMBANGUNAN : SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA
PRIORITAS BIDANG : Pengendalian Kuantitas Penduduk

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010 - 2014 (Rp. Miliar)
				2010	2014			
2.	Penyerasian Kebijakan Pengendalian Penduduk	Meningkatnya keserasian kebijaksanaan pengendalian penduduk	1. Persentase kebijakan pembangunan yg diserasikan dengan Kebijakan Kependudukan dan KB	-	75			289,7
			2. Persentase parameter kependudukan yang tersedia tepat waktu	-	100			
			3. Persentase penentu kebijakan yang menerapkan perspektif pembangunan berwawasan kependudukan dalam kebijakan sektor	-	50			
2.1	Analisis dan kajian kebijakan pengendalian penduduk	Meningkatnya keserasian kebijakan pembangunan dengan kebijakan pengendalian kuantitas penduduk	1. Jumlah kajian/analisis kebijakan pembangunan yang kurang serasi dengan program KKB	34	34	Program Kependudukan dan Keluarga Berencana	BKKBN	101,9
			2. Persentase kebijakan pembangunan yg diserasikan dengan Kebijakan Kependudukan dan KB	-	75			
2.2	Penetapan parameter kependudukan	Tersedianya parameter kependudukan dan KB yang disepakati oleh lintas sektor terkait dan dijadikan sebagai acuan	1. Jumlah kajian neraca kependudukan yang disusun	34	34 ^{ki}	Program Kependudukan dan Keluarga Berencana	BKKBN	101,6
			2. Jumlah neraca kependudukan yang disusun	34	170 ^{ki}			
			3. Jumlah kajian parameter kependudukan dan KB	34	170 ^{ki}			

BIDANG PEMBANGUNAN : SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA
PRIORITAS BIDANG : Pengendalian Kuantitas Penduduk

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (hasil <i>outcomes/output</i> yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010 - 2014 (Rp. Miliar)
				2010	2014			
		dalam penyusunan rencana dan pelaksanaan program pembangunan sektor	4. Persentase parameter kependudukan yang tersedia tepat waktu	-	100			
			5. Indeks pemanfaatan hasil analisis parameter kebijakan penyerasian dampak kependudukan oleh <i>stakeholders</i> dan mitra kerja (dari skala 1-4)	-	3			
2.3	Sosialisasi kebijakan dan program kependudukan	Meningkatnya komitmen lintas sektor serta pengetahuan, sikap, dan perilaku masyarakat tentang pembangunan berwawasan kependudukan	1. Persentase <i>Stakeholders</i> dan mitra kerja yang menerima sosialisasi	-	80	Program Kependudukan dan Keluarga Berencana	BKKBN	86,3
			2. Persentase penentu kebijakan yang menerapkan perspektif pembangunan berwawasan kependudukan dalam kebijakan sektor	-	50			
			3. Jumlah modul pendidikan tentang kependudukan	1	5 ^{ki}			
			4. Persentase sekolah yang melaksanakan modul pendidikan tentang kependudukan	-	20			

BIDANG PEMBANGUNAN : SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA
PRIORITAS BIDANG : Pengendalian Kuantitas Penduduk

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010 - 2014 (Rp. Miliar)
				2010	2014			
3.	Peningkatan Ketersediaan dan Kualitas Data dan Informasi Kependudukan	Meningkatnya ketersediaan kualitas data dan informasi kependudukan yang bersumber dari sensus, survei, dan registrasi vital kependudukan	1. Tersedianya proyeksi penduduk 2010-2020	Angka sementara SP: Agustus 2010	Proyeksi Penduduk 2010-2025 Kabupaten/Kota			11.701,7
			2. Terselenggaranya Post Enumeration Survey (PES) terhadap Sensus Penduduk 2010	Penyelenggaraan PES SP2010 serta Coverage dan content error SP2010 (Preliminary report)	Coverage dan content error SP 2010 (Final Report)			
			3. Jumlah kabupaten/kota yang memberikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) kepada setiap penduduk.	497	497			

BIDANG PEMBANGUNAN : SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA
PRIORITAS BIDANG : Pengendalian Kuantitas Penduduk

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010 - 2014 (Rp. Miliar)
				2010	2014			
			4. Jumlah koneksitas Kementerian/ Lembaga yang telah mengembangkandata warehouse berbasis data kependudukan dengandata warehouse NIK Nasional (K/L)	4	15 ^{ki}			
3.1	Pengembangan Sistem Adminstrasi Kependudukan (SAK) Terpadu	Terlaksananya tertib administrasi kependudukan dengan tersedianya data dan informasi penduduk yang akurat dan terpadu.	1. Jumlah kabupaten/kota yang memberikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) kepada setiap penduduk. 2. Jumlah penduduk yang menerima e-KTP berbasis NIK dengan perekaman sidik jari	497	497	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Kemendagri	6.600 (Angka sementara untuk 5 tahun. Kepastian alokasi dana pertahun menunggu penyelesaian Grand Design)
				4,2 juta jiwa; 6 kabupaten kota	172 juta jiwa; 497 ^{ki} kab/kota			

BIDANG PEMBANGUNAN : SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA
PRIORITAS BIDANG : Pengendalian Kuantitas Penduduk

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010 - 2014 (Rp. Miliar)
				2010	2014			
3.2	Pengelolaan Informasi Manajemen Kependudukan	Terlaksananya penataan sistem koneksi SLAK yang berbasis NIK dengan sistem informasi kementerian/lembaga melalui pembangunan dan pengembangan data warehouse berbasis data kependudukan dengan NIK Nasional	Jumlah koneksitas Kementerian/ Lembaga yang telah mengembangkandata warehouse berbasis data kependudukan dengan data warehouse NIK Nasional (K/L)	4	15 ^{k)}	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Kemendagri	148,8
			Jumlah smart card atau dokumen lainnya yang diterbitkan oleh Kementerian/ Lembaga yang telah mengembangkandata warehouse berbasis data kependudukan dengan NIK Nasional untuk peningkatan pelayanan publik	-	23 ^{k)}			
3.3	Penataan Kebijakan Perkembangan Kependudukan	Terwujudnya Sistem Administrasi Kependudukan yang baik sebagai upaya reformasi pelayanan registrasi penduduk dan pencatatan sipil.	Jumlah daerah yang telah menetapkan perda sebagai amanat UU No. 23 Tahun 2006 dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan (Kab/Kota)	127	497	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Kemendagri	15,4
			Jumlah peraturan pelaksana UU No. 23 Tahun 2006 dan peraturan tentang penyelenggaraan registrasi penduduk dan catatan sipil (Permendagri)	4	18 ^{k)}			

BIDANG PEMBANGUNAN : SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA
PRIORITAS BIDANG : Pengendalian Kuantitas Penduduk

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010 - 2014 (Rp. Miliar)
				2010	2014			
3.4	Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei	Tersedianya Kerangka Contoh Induk Survei rumah tangga, dan pelaksanaan Post Enumeration Survey (PES) terhadap Sensus	Terselenggaranya Post Enumeration Survey (PES), terhadap Sensus Penduduk 2010, Sensus Pertanian 2013, serta Persiapan Sensus Ekonomi 2016	Penyelenggaraan PES SP2010 serta Coverage dan content error SP2010 (Preliminary report)	Laporan coverage dan content error Sensus Pertanian 2013 - Coverage dan content error SP 2010 (Final Report)	Program Penyediaan an Pelayanan Informasi Statistik	BPS	87,9
3.5	Penyediaan dan Pengembangan Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan	1. Tersedianya parameter demografi dan indikator-indikator MDG's serta targetting beberapa kebijakan sosial melalui Sensus Penduduk (SP) 2010	1. Tersedianya proyeksi penduduk 2010-2020	Angka sementara SP: Agustus 2010	Proyeksi Penduduk 2010-2025 Kabupaten/Kota	Program Penyediaan Pelayanan Informasi Statistik	BPS	3.903,0

BIDANG PEMBANGUNAN : SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA
PRIORITAS BIDANG : Pengendalian Kuantitas Penduduk

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010 - 2014 (Rp. Miliar)
				2010	2014			
			2. Tersedianya indikator untuk perencanaan, evaluasi, dan analisis sosial seperti pendidikan, lansia, perumahan, dan kecacatan, serta pencapaian MDG's	Pelaksanaan Sensus Penduduk 2010	Analisis hasil SP 2010			
		2. Tersedianya data statistic ketenagakerjaan dan pengangguran pada tingkat nasional, provinsi, dan kab/kota	Tersedianya indikator pengangguran dan kesempatan kerja	Dua kali setahun	Setiap bulan di tingkat nasional			
3.6	Penyediaan dan Pengembangan Statistik Kesejahteraan Rakyat	Tersedianya data statistik kesejahteraan rakyat secara nasional, provinsi, kab/kota yang meliputi data karakteristik rumah tangga, perumahan, pendidikan, dan kesehatan	Cakupan dan Penyajian Hasil SUSENAS dipercepat	2 kali dalam satu tahun di tingkat nasional dan Provinsi, sekali utk tingkat Kab/Kota	Setiap Bulan utk Tingkat nasional, Triwulanan Tingkat Provinsi dan Bulanan Kab/Kota	Program Penyediaan Pelayanan Informasi Statistik	BPS	946,6
TOTAL								20.078,1

KETERANGAN :

K) Angka Kumulatif 5 tahun (2010-2014)

BIDANG PEMBANGUNAN : SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN AGAMA
PRIORITAS BIDANG : Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
1	Peningkatan kesehatan ibu, bayi dan balita	Meningkatnya ketersediaan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan ibu dan reproduksi serta pelayanan kesehatan anak	1. Persentase ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih (cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan(PN))	84	90			7.979,6
			2. Cakupan kunjungan neonatal pertama (KN1)	84	90			
1.1	Pembinaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Reproduksi	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan ibu dan reproduksi	1. Persentase ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih (cakupan PN)	84	90	Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak	Kementerian Kesehatan	2.194,0
			2. Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal (cakupan kunjungan kehamilan ke empat (K4))	84	95			
			3. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan KB sesuai standar	10	100			

BIDANG PEMBANGUNAN : SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN AGAMA
PRIORITAS BIDANG : Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
1.2	Pembinaan Pelayanan Kesehatan Anak	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan anak	1. Cakupan kunjungan neonatal pertama (KN1)	84	90	Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak	Kementerian Kesehatan	1.723,0
			2. Cakupan pelayanan kesehatan bayi	84	90			
			3. Cakupan pelayanan kesehatan balita	78	85			
1.3	Pembinaan Keperawatan dan Kebidanan	Meningkatnya Pembinaan Keperawatan dan Kebidanan	Jumlah Puskesmas yang menerapkan pelayanan kebidanan sesuai standar dan pedoman	70	350	Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak	Kementerian Kesehatan	68,0
1.4	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak	Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) beroperasi	70.000	78.000	Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak	Kementerian Kesehatan	3.994,6

BIDANG PEMBANGUNAN : SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN AGAMA
PRIORITAS BIDANG : Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
2	Perbaikan status gizi masyarakat	Meningkatnya status gizi masyarakat	Persentase balita ditimbang berat badannya (jumlah balita ditimbang/seluruh balita (D/S))	65	85			2.804,2
2.1	Pembinaan Gizi Masyarakat	Meningkatnya kualitas penanganan masalah gizi masyarakat	1. Persentase balita gizi buruk yang mendapat perawatan	100	100	Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak	Kementerian Kesehatan	2.804,2
			2. Persentase balita ditimbang berat badannya (D/S)	65	85			
3	Pengendalian penyakit menular serta penyakit tidak menular diikuti penyehatan lingkungan	Menurunnya angka kesakitan, kematian dan kecacatan akibat penyakit	1. Persentase bayi usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap	80	90			11.263,4
			2. Angka penemuan kasus Malaria per 1.000 penduduk	2	1			

BIDANG PEMBANGUNAN : SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN AGAMA

PRIORITAS BIDANG : Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
			3. Jumlah kasus TB per 100.000 penduduk	235	224			
			4. Persentase kasus baru TB Paru (BTA positif) yang ditemukan	73	90			
			5. Persentase kasus baru TB Paru (BTA positif) yang disembuhkan	85	88			
			6. Angka kesakitan penderita DBD per100.000 penduduk	55	51			
			7. Prevalensi kasus HIV	0,2	<0,5			
			8. Jumlah kasus Diare per 1.000 penduduk	350	285			

BIDANG PEMBANGUNAN : SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN AGAMA
PRIORITAS BIDANG : Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
			9. Jumlah desa yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	2.500	20.000 ^{k)}			
3.1	Pembinaan imunisasi dan Karantina Kesehatan	Meningkatnya pembinaan di bidang imunisasi dan karantina kesehatan	Persentase bayi usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap	80	90	Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan	Kementerian Kesehatan	1.205,9
3.2	Pengendalian Penyakit Menular Langsung	Menurunnya angka kesakitan dan kematian akibat penyakit menular langsung	1. Prevalensi kasus HIV	0,2	<0,5	Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan	Kementerian Kesehatan	1.237,3
			2. Jumlah kasus TB per100.000 penduduk	235	224			
			3. Persentase kasus baru TB Paru (BTA positif) yang ditemukan	73	90			
			4. Persentase kasus baru TB Paru (BTA positif) yang disembuhkan	85	88			

BIDANG PEMBANGUNAN : SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN AGAMA
PRIORITAS BIDANG : Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
			5. Jumlah kasus Diare per 1.000 penduduk	350	285			
			6. Persentase Orang dengan HIV dan AIDS (ODHA) yang mendapatkan <i>Anti Retroviral Treatment</i> (ART)	30	50			
			7. Persentase penduduk 15 tahun ke atas menurut pengetahuan tentang HIV dan AIDS	65	95			
3.3	Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang	Meningkatnya pencegahan dan penanggulangan penyakit bersumber binatang	1. Angka kesakitan penderita DBD per 100.000 penduduk	55	51	Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan	Kementerian Kesehatan	1.254,0
			2. Angka penemuan kasus Malaria per 1.000 penduduk	2	1			

BIDANG PEMBANGUNAN : SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN AGAMA
PRIORITAS BIDANG : Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
3.4	Penyehatan Lingkungan	Meningkatnya penyehatan dan pengawasan kualitas lingkungan	1. Persentase penduduk yang memiliki akses terhadap air minum berkualitas	62	67	Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan	Kementerian Kesehatan	2.054,5
			2. Persentase kualitas air minum yang memenuhi syarat	85	100			
			3. Persentase penduduk yang menggunakan jamban sehat	64	75			
3.5	Pengendalian Penyakit Tidak Menular	Menurunnya angka kesakitan dan kematian akibat penyakit tidak menular	Persentase provinsi yang memiliki Perda tentang Kawasan Tanpa Rokok	40	100	Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan	Kementerian Kesehatan	1.084,4
3.6	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan	Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan	Jumlah Unit Pelaksana Teknis (UPT) vertikal yang ditingkatkan sarana dan prasarananya	59	59	Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan	Kementerian Kesehatan	4.427,3

BIDANG PEMBANGUNAN : SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN AGAMA
PRIORITAS BIDANG : Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
4	Pengembangan sumber daya manusia (SDM) kesehatan	Meningkatnya ketersediaan dan mutu sumber daya manusia kesehatan secara profesional	Persentase tenaga kesehatan yang profesional dan memenuhi standar kompetensi	60	80			13.932,2
4.1	Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan	Meningkatnya perencanaan dan pendayagunaan SDM kesehatan	1. Jumlah tenaga kesehatan yang didayagunakan dan diberi insentif di Daerah Terpencil, Tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan (DTPK)	1.200	7.020 ^{k)}	Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan	Kementerian Kesehatan	2.884,9
			2. Jumlah residen senior yang didayagunakan dan diberi insentif	700	4.850 ^{k)}			
4.2	Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan	Meningkatnya pelaksanaan pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan	Jumlah tenaga pendidik dan kependidikan yang ditingkatkan kemampuannya	2.350	13.000 ^{k)}	Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan	Kementerian Kesehatan	908,1

BIDANG PEMBANGUNAN : SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN AGAMA
PRIORITAS BIDANG : Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
4.3	Sertifikasi, Standardisasi dan Peningkatan Mutu SDM Kesehatan	Terselenggaranya sertifikasi, standardisasi dan peningkatan mutu SDM kesehatan	1. Jumlah SDM kesehatan di fasilitas kesehatan yang telah ditingkatkan kemampuannya melalui pendidikan berkelanjutan	7.530	42.530 ^{k)}	Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan	Kementerian Kesehatan	2.316,0
			2. Persentase profesi tenaga kesehatan yang memiliki standar kompetensi	30	90			
4.4	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan	Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada Program Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan	1. Jumlah UPT yang ditingkatkan sarana dan prasarannya	30	60	Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan	Kementerian Kesehatan	7.823,2
			2. Jumlah lulusan tenaga kesehatan dari lembaga pendidikan pemerintah	13.000	75.000 ^{k)}			

BIDANG PEMBANGUNAN : SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN AGAMA
PRIORITAS BIDANG : Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
5	Peningkatan ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan, keamanan, mutu dan penggunaan obat serta pengawasan obat dan makanan	Meningkatnya sediaan farmasi dan alat kesehatan yang memenuhi standar, dan terjangkau oleh masyarakat	1. Persentase ketersediaan obat dan vaksin	80	100			10.663,4
			2. Proporsi Obat yang memenuhi standar (aman, manfaat dan mutu)	99,23	99,63			
			3. Proporsi makanan yang memenuhi syarat	75	90			
5.1	Peningkatan Ketersediaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan	Meningkatnya ketersediaan obat esensial generik di sarana pelayanan kesehatan dasar	Persentase ketersediaan obat dan vaksin	80	100	Kefarmasian dan Alat Kesehatan	Kementerian Kesehatan	7.473,2
5.2	Peningkatan Produksi dan Distribusi Kefarmasian	Meningkatnya produksi bahan baku dan obat lokal serta mutu sarana produksi dan distribusi kefarmasian	Jumlah bahan baku obat dan obat tradisional produksi di dalam negeri	5	45 ^{k)}	Kefarmasian dan Alat Kesehatan	Kementerian Kesehatan	125,0

BIDANG PEMBANGUNAN : SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN AGAMA
PRIORITAS BIDANG : Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
5.3	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan	Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan	Persentase dokumen anggaran yang diselesaikan	80	100	Kefarmasian dan Alat Kesehatan	Kementerian Kesehatan	421,1
5.4	Pengawasan Produksi Produk Terapeutik dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT)	Meningkatnya Mutu Sarana Produksi Produk Terapeutik dan PKRT sesuai <i>Good Manufacturing Practice</i> (GMP) terkini	Persentase sarana produksi obat yang memiliki sertifikasi GMP yang terkini	60	85	Pengawasan Obat dan Makanan	BPOM	32,6
5.5	Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya	Menurunnya makanan yang mengandung bahan berbahaya	Persentase makanan yang mengandung cemaran bahan berbahaya/dilarang	25	10	Pengawasan Obat dan Makanan	BPOM	15,7
5.6	Pengawasan Obat dan Makanan di 31 Balai Besar/Balai POM	Meningkatnya kinerja pengawasan obat dan makanan di seluruh Indonesia	1. Jumlah sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan yang diperiksa	15.000	76.516 ^{k)}	Pengawasan Obat dan Makanan	BPOM	1.619,8

BIDANG PEMBANGUNAN : SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN AGAMA
PRIORITAS BIDANG : Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
			2. Jumlah produk Obat dan Makanan yang disampel dan diuji	97.000	494.798 ^{k)}			
5.7	Pemeriksaan secara Laboratorium, Pengujian dan Penilaian Keamanan, Manfaat dan Mutu Obat dan Makanan serta Pembinaan Laboratorium POM	Meningkatnya kemampuan uji laboratorium POM sesuai standar	Persentase Laboratorium Balai POM yang terakreditasi secara konsisten sesuai standar	84	100	Pengawasan Obat dan Makanan	BPOM	194,3
5.8	Standardisasi Produk Terapeutik dan PKRT	Tersusunnya standar, pedoman dan kriteria Produk Terapeutik dan PKRT yang mampu menjamin aman, bermanfaat dan bermutu	Persentase kecukupan standar Obat yang dimiliki dengan yang dibutuhkan	20	94	Pengawasan Obat dan Makanan	BPOM	16,8

BIDANG PEMBANGUNAN : SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN AGAMA
PRIORITAS BIDANG : Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
5.9	Pelayanan informasi Obat dan Makanan, Informasi Keracunan dan Teknologi Informasi	Berfungsinya sistem informasi yang terintegrasi secara <i>online</i> dan <i>up to date</i> dalam pengawasan obat dan makanan	Persentase tersedianya <i>baseline data</i> pengawasan Obat dan Makanan	0	100 ¹⁾	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPOM	BPOM	80,2
5.10	Pengembangan Tenaga dan Manajemen Pengawasan Obat dan Makanan	Terselenggaranya pengembangan tenaga dan manajemen pengawasan Obat dan Makanan	Jumlah pegawai Badan POM yang ditingkatkan pendidikannya S2 dan S3	0	384 ^{k)}	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPOM	BPOM	615,9
5.11	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPOM	Terselenggaranya pengadaan sarana dan prasarana aparatur Badan POM	Jumlah sarana dan prasarana yang diadakan sesuai kebutuhan	2	10 ^{k)}	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPOM	BPOM	68,8

BIDANG PEMBANGUNAN : SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN AGAMA
PRIORITAS BIDANG : Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
6	Pengembangan sistem jaminan pembiayaan kesehatan	Meningkatnya pembiayaan kesehatan untuk memberikan jaminan perlindungan kesehatan masyarakat	Persentase penduduk (termasuk seluruh penduduk miskin) yang memiliki jaminan kesehatan	59	100			32.072,3
6.1	Pembinaan, Pengembangan Pembiayaan dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan	Terumuskannya kebijakan pembiayaan dan jaminan kesehatan	Persentase penduduk (termasuk seluruh penduduk miskin) yang memiliki jaminan kesehatan	59	100	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Kementerian Kesehatan	842,4
6.2	Pelayanan Kesehatan Rujukan Bagi Masyarakat Miskin (Jamkesmas)	Meningkatnya pelayanan kesehatan rujukan bagi penduduk miskin di RS	Persentase RS yang melayani pasien penduduk miskin peserta program Jamkesmas	75	95	Pembinaan Upaya Kesehatan	Kementerian Kesehatan	24.782,7

BIDANG PEMBANGUNAN : SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN AGAMA
PRIORITAS BIDANG : Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
6.3	Pelayanan Kesehatan Dasar Bagi Masyarakat Miskin (Jamkesmas)	Meningkatnya pelayanan kesehatan dasar bagi penduduk miskin di Puskesmas	Jumlah puskesmas yang memberikan pelayanan kesehatan dasar bagi penduduk miskin	8.481	9.000	Pembinaan Upaya Kesehatan	Kementerian Kesehatan	6.447,2
7	Pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan bencana dan krisis kesehatan	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan kesehatan dan penanggulangan krisis	1. Persentase rumah tangga yang melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)	50	70			1.546,8
			2. Jumlah Kab/Kota yang mempunyai kemampuan tanggap darurat dalam penanganan bencana	105	300			
7.1	Pemberdayaan Masyarakat dan Promosi Kesehatan	Meningkatnya pelaksanaan pemberdayaan dan promosi kesehatan kepada masyarakat	Persentase rumah tangga yang melaksanakan PHBS	50	70	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Kementerian Kesehatan	895,8

BIDANG PEMBANGUNAN : SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN AGAMA
PRIORITAS BIDANG : Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
7.2	Penanggulangan Krisis Kesehatan	Meningkatnya penanggulangan krisis secara cepat	Jumlah Kab/Kota yang mempunyai kemampuan tanggap darurat dalam penanganan bencana	105	300	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Kementerian Kesehatan	651,0
8	Peningkatan pelayanan kesehatan primer, sekunder dan tersier	Meningkatkan upaya kesehatan dasar, rujukan, tradisional, alternatif dan komplementer, kesehatan kerja, olah raga dan matra serta standarisasi, akreditasi dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan	1. Jumlah kota di Indonesia yang memiliki RS standar kelas dunia (<i>world class</i>)	1	5			46.947,3
			2. Jumlah puskesmas yang menjadi puskesmas perawatan di perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar berpenduduk	76	96			
8.1	Pembinaan Upaya Kesehatan Dasar	Meningkatnya pelayanan kesehatan dasar kepada masyarakat	1. Jumlah puskesmas yang menjadi puskesmas perawatan di perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar berpenduduk	76	96	Pembinaan Upaya Kesehatan	Kementerian Kesehatan	1.252,0

BIDANG PEMBANGUNAN : SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN AGAMA

PRIORITAS BIDANG : Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
			2. Persentase puskesmas rawat inap yang mampu PONEK	60	100			
8.2	Pembinaan Upaya Kesehatan Rujukan	Meningkatnya pelayanan medik spesialistik kepada masyarakat	1. Jumlah kota di Indonesia yang memiliki RS standar kelas dunia (<i>world class</i>)	1	5	Pembinaan Upaya Kesehatan	Kementerian Kesehatan	434,5
			2. Persentase RS kab/kota yang melaksanakan PONEK	80	100			
			3. Persentase RS Pemerintah menyelenggarakan pelayanan rujukan bagi Orang dengan HIV dan AIDS (ODHA)	60	100			
			4. Jumlah Kab/Kota yang dilayani oleh rumah sakit bergerak di DTPK	14	18			

BIDANG PEMBANGUNAN : SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN AGAMA
PRIORITAS BIDANG : Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
8.3	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	Tersedianya Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) untuk puskesmas	Jumlah puskesmas yang mendapatkan bantuan operasional kesehatan dan menyelenggarakan lokakarya mini untuk menunjang pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)	300	9.000	Pembinaan Upaya Kesehatan	Kementerian Kesehatan	4.940,0
8.4	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pembinaan Upaya Kesehatan	Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada Program Pembinaan Upaya Kesehatan	Jumlah UPT yang ditingkatkan sarana dan prasarananya	34	34	Pembinaan Upaya Kesehatan	Kementerian Kesehatan	40.320,8
TOTAL								127.209,3

Keterangan :

¹⁾ Target tercapai pada tahun 2011

²⁾ Angka Kumulatif 5 tahun (2010-2014)

BIDANG PEMBANGUNAN: SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA
PRIORITAS BIDANG : Peningkatan Akses, Kualitas, dan Relevansi Pendidikan

NO.	FOKUS/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
1.	Peningkatan Kualitas Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Yang Merata	Tercapainya Keluasan dan Kemerataan Akses Pendidikan Dasar yang Bermutu dan Relevan dengan Kebutuhan Masyarakat	APM SD/MI/paket A/ sederajat	95,20%	96,00%		Kemendiknas, Kemenag	149.125,2
			APM SMP/MTs/paket B/ sederajat	74,00%	76,00%			
			APK SD/MI/paket A/ sederajat	117,20%	119,10%			
			APK SMP/MTs/paket B/ sederajat	99,30%	110,00%			
			APS usia 7-12 tahun	97,90%	>99%			
			APS usia 13-15 tahun	87,90%	>95%			
			Jumlah siswa SD/SDLB sasaran BOS	27.672.820	28.211.000			
			Jumlah siswa SMP/SMPLB sasaran BOS	9.660.639	10.870.000			
			Jumlah siswa SD/SDLB sasaran beasiswa miskin	2.767.282	3.103.210			
			Jumlah siswa SMP/SMPLB sasaran beasiswa miskin	966.064	1.195.700			
			Persentase SD menerapkan e-Pembelajaran	16%	40%			
			Persentase SD yang memiliki fasilitas internet	10%	30%			
			Persentase SMP yang menerapkan pembelajaran dengan pendekatan CTL berbasis TIK	21,4%	75,0%			
			Persentase SD/SDLB berakreditasi minimal B	10%	15%			

BIDANG PEMBANGUNAN: SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA
PRIORITAS BIDANG : Peningkatan Akses, Kualitas, dan Relevansi Pendidikan

NO.	FOKUS/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
			Persentase SMP/SMPLB berakreditasi minimal B	21%	27%			
			Persentase peserta didik SD putus sekolah	1,50%	0,70%			
			Persentase peserta didik SMP putus sekolah	1,80%	1,00%			
1.1	Penjaminan Kepastian Layanan Pendidikan SD	Tercapainya Keluasan dan Kemerataan Akses SD Bermutu dan Berkesetaraan gender di Semua Kabupaten dan Kota	APM SD/SDLB	84,65%	85,36%	Program Pendidikan	Kementerian Pendidikan Nasional	11.633,4
			APK SD/SDLB	103,76%	105,44%	Taman Kanak-kanak dan Pendidikan Dasar		
			Provinsi ber-APM > 83,57%	82,46%	85,00%			
			Persentase peserta didik SD putus sekolah	1,50%	0,70%			
			Persentase SD menerapkan e-Pembelajaran	16,0%	40,0%			
			Persentase SD yang memiliki fasilitas internet	10,0%	30,0%			
			Persentase SD/SDLB berakreditasi minimal B	9,6%	15,0%			
			Rasio APM peserta didik perempuan: laki-laki pada SD/SDLB	>0,98	1			

BIDANG PEMBANGUNAN: SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA
PRIORITAS BIDANG : Peningkatan Akses, Kualitas, dan Relevansi Pendidikan

NO.	FOKUS/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
1.2	Penyediaan subsidi Pendidikan SD/SDLB berkualitas	Tersalurkannya bantuan BOS bagi siswa SD/SDLB	Jumlah siswa SD/SDLB sasaran BOS	27.672.820	28.211.000	Program Pendidikan Taman Kanak-kanak dan Pendidikan Dasar	Kementerian Pendidikan Nasional	59.599,1
			Jumlah siswa SD/SDLB sasaran beasiswa miskin	2.767.282	3.103.210			
1.3	Penjaminan Kepastian Pendidikan SMP/SMPLB	Tercapainya Keluasan dan pemerataan Akses SMP Bermutu dan Berkesetaraan gender di Semua Kabupaten dan Kota	APM SMP/SMPLB	59,46%	61,07%	Program Pendidikan Taman Kanak-kanak dan Pendidikan Dasar	Kementerian Pendidikan Nasional	12.684,6
			Provinsi ber-APM > 58,17%	20,42%	90,00%			
			Persentase peserta didik SMP putus sekolah	1,80%	1,00%			
			Persentase SMP yang menerapkan pembelajaran dengan pendekatan CTL berbasis TIK	21,40%	75,00%			
			Persentase SMP/SMPLB berakreditasi minimal B	20,60%	27,00%			
Rasio APM peserta didik perempuan/laki-laki pada SMP	>0,97	1						
1.4	Penyediaan subsidi Pendidikan SMP/SMPLB berkualitas	Tersalurkannya bantuan BOS bagi siswa SMP/SMPLB	Jumlah siswa SMP/SMPLB sasaran BOS	9.660.639	10.870.000	Program Pendidikan Taman Kanak-kanak dan Pendidikan Dasar	Kementerian Pendidikan Nasional	31.512,3
			Jumlah siswa SMP/SMPLB sasaran beasiswa miskin	966.064	1.195.700			

BIDANG PEMBANGUNAN: SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA
PRIORITAS BIDANG : Peningkatan Akses, Kualitas, dan Relevansi Pendidikan

NO.	FOKUS/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
1.5	Peningkatan Akses dan Mutu Madrasah Ibtidaiyah	Meningkatnya APM MI	APM MI	10,55%	10,64%	Program Pendidikan Islam	Kementerian Agama	13.732,1
		Meningkatnya APK MI	APK MI	13,44%	13,66%			
		Membatkannya rasio kesetaraan gender di MI	Rasio APM peserta didik perempuan: laki-laki pada MI	>0,98	1			
		Terlaksananya Rehab Ruang Kelas MI	Ruang Kelas MI yang direhab (Ruang)	2.165	8.805 ^{k)}			
		Terlaksananya Bantuan Peningkatan Mutu Madrasah MI	Mutu Madrasah MIN (Lokasi)	80	580 ^{k)}			
			Mutu Madrasah MIS (Lokasi)	80	1.080 ^{k)}			
		Terlaksananya Pembangunan	Perpustakaan MI (Ruang)	500	2.000 ^{k)}			
Terselenggaranya Ujian Nasional MI/MTs Bidang Studi Keagamaan	Penyelenggaraan Ujian Nasional MI/MTs Bidang Studi Keagamaan (Orang)	1.300.000	1.300.000					

BIDANG PEMBANGUNAN: SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA
PRIORITAS BIDANG : Peningkatan Akses, Kualitas, dan Relevansi Pendidikan

NO.	FOKUS/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
1.6	Peningkatan Akses dan Mutu Madrasah Tsanawiyah	Meningkatnya APK MTs	APK MTs	19,32%	21,41%			
		Meningkatnya APM MTs	APM MTs	14,54%	14,93%			
		Membaiknya rasio kesetaraan gender di MTs	Rasio APM peserta didik perempuan: laki-laki pada MTs	>0,97	1			
		Terlaksananya Rehab Ruang Kelas MTs	Ruang Kelas MTs yang direhab (Ruang)	6.350	18.526 ^{k)}			
		Terlaksananya Bantuan	Mutu Madrasah MTsN (Lokasi)	80	580 ^{k)}			
		Peningkatan Mutu Madrasah	Mutu Madrasah MTsS (Lokasi)	80	1.080 ^{k)}			
		Terlaksananya Pembangunan Laboratorium IPA di MTs	Laboratorium IPA di MTs (Ruang)	500	2.000 ^{k)}			
		Tersedianya Peralatan Laboratorium IPA di MTs	Peralatan Laboratorium IPA di MTs (Set)	500	2.000 ^{k)}			
Terlaksananya Pembangunan RKB MTs	RKB MTs (Ruang)	950	5.702 ^{k)}					

BIDANG PEMBANGUNAN: SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA
PRIORITAS BIDANG : Peningkatan Akses, Kualitas, dan Relevansi Pendidikan

NO.	FOKUS/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
1.7	Penyediaan Subsidi Pendidikan Madrasah Bermutu	Tersedianya anggaran BOS MI dan MTs	APK MI	13,44%	13,66%	Program Pendidikan Islam	Kementerian Agama	18.335,0
			APK MTs	19,32%	21,41%			
			Siswa MI penerima BOS (Siswa)	3.364.009	3.588.025			
			Siswa MTs penerima BOS (Siswa)	2.820.141	3.007.940			
		Tersedianya Beasiswa Miskin MI	Siswa Miskin MI Penerima Beasiswa (Siswa)	640.000	640.000			
		Tersedianya Beasiswa Miskin MTs	Siswa Miskin MTs Penerima Beasiswa (Siswa)	540.000	540.000			
1.8	Penyediaan Subsidi Pendidikan Agama Islam Bermutu	Tersedianya anggaran BOS Diniyah Ula dan Diniyah Wustha	Siswa Diniyah Ula Penerima BOS	191.794	204.566	Program Pendidikan Islam	Kementerian Agama	1.628,8
			Siswa Diniyah Wustha Penerima BOS	418.572	446.445			

BIDANG PEMBANGUNAN: SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA
PRIORITAS BIDANG : Peningkatan Akses, Kualitas, dan Relevansi Pendidikan

NO.	FOKUS/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
2	Peningkatan Akses, Kualitas, dan Relevansi Pendidikan Menengah	Tercapainya Keluasan dan Kemerataan Akses Pendidikan Menengah yang Bermutu dan Relevan dengan Kebutuhan Masyarakat	APK SMA/SMK/SMLB/MA/paket B/ sederajat	73,00%	85,00%		Kemendiknas, Kemenag	23.330,5
			Jumlah siswa SMK penerima BOMM	3.000.000	3.400.000			
			Jumlah siswa SMA penerima BOMM	2.700.000	3.100.000			
			Jumlah siswa SMK sasaran beasiswa miskin	305.535	645.298			
			Jumlah siswa SMA sasaran beasiswa miskin	378.783	800.000			
			Persentase SMK berakreditasi minimal B.	22%	30%			
			Persentase SMA berakreditasi minimal B	23%	40%			
			Persentase SMK bersertifikat ISO 9001:2000/ 9001:2008	25,60%	100%			
			Persentase lulusan SMK yang bekerja pada tahun kelulusan	50%	70%			
2.1	Penyediaan dan Peningkatan Pendidikan SMK	Tercapainya Perluasan dan Pemerataan Akses Pendidikan SMK Bermutu, Berkesetaraan gender, dan Relevan dengan Kebutuhan Masyarakat, di Semua Kabupaten dan Kota	APK SMK	30,06%	35,56%	Program Pendidikan Menengah	Kementerian Pendidikan Nasional	9.242,9
			Provinsi ber-APK > 32,88%	32,54%	90,00%			
			Jumlah siswa SMK penerima BOMM	3.000.000	3.400.000			
			Jumlah siswa SMK sasaran beasiswa miskin	305.535	645.298			
			Persentase SMK berakreditasi minimal B.	22%	30%			
			Persentase SMK bersertifikat ISO 9001:2000/ 9001:2008	25,60%	100%			
			Persentase lulusan SMK yang bekerja pada tahun ke-2 kelulusan	39%	52%			

BIDANG PEMBANGUNAN: SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA
PRIORITAS BIDANG : Peningkatan Akses, Kualitas, dan Relevansi Pendidikan

NO.	FOKUS/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
			Persentase SMK menerapkan pembelajaran berpusat pada peserta didik yang kontekstual berbasis TIK	50%	100%			
2.2	Penyediaan dan Peningkatan Pendidikan SMA/SMLB	Tercapainya Perluasan dan Pemerataan Akses Pendidikan SMA Bermutu, Berkesetaraan gender, dan Relevan dengan Kebutuhan Masyarakat, di Semua Kabupaten dan Kota	APK SMA/SMLB nasional	35,59%	40,88%	Program Pendidikan Menengah	Kementerian Pendidikan Nasional	6.530,5
			Provinsi ber-APK > 37,79%	54,36%	90,00%			
			Jumlah siswa SMA penerima BOMM	2.700.000	3.100.000			
			Jumlah siswa SMA sasaran beasiswa miskin	378.783	800.000			
			Persentase SMA berakreditasi minimal B	23,40%	40,00%			
			Jumlah SMA bersertifikat ISO 9001:2008	316	1.500			
			Rasio APK peserta didik perempuan:laki-laki pada SMA/SM	>0,80	1			
			Persentase SMA yang menerapkan pembelajaran berpusat pada peserta didik yang kontekstual berbasis TIK	40%	80%			

BIDANG PEMBANGUNAN: SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA
PRIORITAS BIDANG : Peningkatan Akses, Kualitas, dan Relevansi Pendidikan

NO.	FOKUS/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
2.3	Peningkatan Akses dan Mutu Madrasah Aliyah	Meningkatnya APK MA	APK MA	7,35%	8,56%	Program Pendidikan Islam	Kementerian Agama	6.342,0
		Membbaiknya rasio kesetaraan gender di MA	Rasio APK peserta didik perempuan: laki-laki pada MA	>0,80	1			
		Terlaksananya Rehab Ruang Kelas MA	Ruang Kelas MA yang direhab (Ruang)	2.121	10.021 ^{k)}			
		Terlaksananya Pengembangan Mutu MA melalui Kontrak Prestasi	Mutu MA melalui Kontrak Prestasi (Lokasi)	48	288 ^{k)}			
		Terlaksananya Pengembangan Pendidikan Keterampilan MA	Pendidikan Keterampilan MA (Lokasi)	58	350 ^{k)}			
		Terlaksananya Bantuan Peningkatan Mutu Madrasah MA	Mutu MAN (Lokasi)	113	565 ^{k)}			
			Mutu MAS (Lokasi)	188	940 ^{k)}			
Terlaksananya Pengembangan MAN Insan Cendekia	MAN Insan Cendekia (Lokasi)	2	3					

BIDANG PEMBANGUNAN: SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA
PRIORITAS BIDANG : Peningkatan Akses, Kualitas, dan Relevansi Pendidikan

NO.	FOKUS/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
		Terlaksananya Pembangunan MA	USB MA (Unit)	243	503 ^{k)}			
		Terlaksananya Pembangunan Madrasah Bertaraf Internasional	Madrasah Bertaraf Internasional (Lokasi)	16	46 ^{k)}			
		Terselenggaranya Ujian	Penyelenggaraan Ujian Nasional MA Bidang Studi	270.000	270.000			
		Terlaksananya Pembangunan RKB MA	RKB MA (Unit)	500	2.500 ^{k)}			
		Terlaksananya Pembangunan Laboratorium dan Perpustakaan MA	Laboratorium dan Perpustakaan MA (Unit)	450	2.250 ^{k)}			
2.4	Penyediaan Subsidi Pendidikan Madrasah Bermutu	Tersedianya Beasiswa Miskin MA	Siswa Miskin MA Penerima Beasiswa (Siswa)	320.000	320.000	Program Pendidikan Islam	Kementerian Agama	1.215,0

BIDANG PEMBANGUNAN: SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA
PRIORITAS BIDANG : Peningkatan Akses, Kualitas, dan Relevansi Pendidikan

NO.	FOKUS/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
3	Peningkatan Kualitas, Relevansi, dan Daya Saing Pendidikan Tinggi	Tercapainya Keluasan dan Kemerataan Akses Pendidikan Tinggi Bermutu, Berdaya Saing Internasional, dan Relevan dengan Kebutuhan Masyarakat	APK PT dan PTA usia 19-23 tahun	24,80%	30,00%		Kemendiknas, Kemenag	123.464,7
			Jumlah mahasiswa penerima beasiswa miskin	124.538	129.538			
			Jumlah beasiswa bagi mahasiswa lulusan SMA/SMK/MA berprestasi	22.035	22.535			
			Jumlah prodi berakreditasi internasional	3	7			
			Jumlah PT 500 terbaik dunia versi THES	4	11			
			Persentase prodi PT berakreditasi	73,70%	90,00%			
			Persentase dosen PTN/BHPP program S1/diploma yang berkualifikasi S2/Sp1	73,00%	100,00%			
			Persentase dosen PTS/BHPP program S1/diploma yang berkualifikasi S2/Sp1	45,00%	85,00%			
			Persentase dosen PTN/BHPP program pascasarjana/spesialis yang berkualifikasi S3/Sp2	68,00%	90,00%			
Persentase dosen PTS/BHPP program pascasarjana/spesialis yang berkualifikasi S3/Sp2	48,00%	85,00%						

BIDANG PEMBANGUNAN: SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA
PRIORITAS BIDANG : Peningkatan Akses, Kualitas, dan Relevansi Pendidikan

NO.	FOKUS/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
			Persentase PT BHMN bersertifikat ISO 9001:2008	100,00%	100,00%			
			Persentase PTN (institut/universitas/sekolah tinggi) bersertifikat ISO 9001:2008	28,60%	100,00%			
			Persentase politeknik negeri bersertifikat ISO 9001:2008	25,90%	100,00%			
			Persentase PTS (institut/universitas/sekolah tinggi) bersertifikat ISO 9001:2008	17,90%	52,90%			
			Persentase PTS (politeknik/akademi) bersertifikat ISO 9001:2008	10,70%	45,70%			
3.1	Penyediaan Layanan Akademik Program Studi	Tersedianya Prodi yang Bermutu, Berdaya Saing Internasional, dan Relevan	APK PT usia 19-23 thn	21,91%	26,50%	Program Pendidikan Tinggi	Kementerian Pendidikan Nasional	16.079,1
			Jumlah prodi berakreditasi internasional	3	23 ^{k)}			
			Jumlah PT 500 terbaik dunia versi THES	4	11			
			Rasio APK peserta didik perempuan:laki-laki pada PT	1,12	1,04			
			Persentase prodi PT berakreditasi	73,70%	90%			

BIDANG PEMBANGUNAN: SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA
PRIORITAS BIDANG : Peningkatan Akses, Kualitas, dan Relevansi Pendidikan

NO.	FOKUS/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
3.2	Penyediaan Dosen dan Tenaga Kependidikan Bermutu	Tersedianya Dosen yang Bermutu dan Berdaya Saing Internasional	Persentase dosen PTN/BHPP program S1/diploma yang berkualifikasi S2/Sp1	73%	100%	Program Pendidikan Tinggi	Kementerian Pendidikan Nasional	15.211,6
			Persentase dosen PTS/BHPM program S1/diploma yang berkualifikasi S2/Sp1	45%	85%			
			Persentase dosen PTN/BHPP program	68%	90%			
			Persentase dosen PTS/BHPM program	48%	85%			
			Persentase dosen PTN/BHPP bersertifikat	35%	100%			
			Persentase dosen PTS/BHPM bersertifikat	20%	90%			
			Persentase dosen yang melaksanakan <i>academic recharging</i> (dalam dan luar negeri)	0,40%	0,80%			
3.3	Penyediaan Layanan Kelembagaan	Tersedianya Keluasan dan Kemerataan Akses PT yang Bermutu dan Berdaya saing Internasional	Jumlah mahasiswa penerima beasiswa miskin	65.000	70.000	Program Pendidikan Tinggi	Kementerian Pendidikan Nasional	5.211,3
			Jumlah beasiswa bagi mahasiswa lulusan SMA/SMK berprestasi	20.000	20.000			
			Jumlah PT masuk dalam QS Star 1-2	14	50			
			Jumlah PT masuk dalam QS Star 3-5	6	25			
			Jumlah PT mengembangkan kerjasama kelembagaan dalam dan luar negeri	40	72			

BIDANG PEMBANGUNAN: SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA
PRIORITAS BIDANG : Peningkatan Akses, Kualitas, dan Relevansi Pendidikan

NO.	FOKUS/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
3.4	Pengembangan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat	Tersedianya Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat	Persentase dosen pasca dengan publikasi internasional	1,20%	6,50%	Program Pendidikan Tinggi	Kementerian Pendidikan Nasional	3.303,9
			Persentase PT yang mempunyai kerjasama dengan industri berbasis penelitian dan pengembangan	1,00%	5,00%			
			Persentase PT yang mempunyai kerjasama dengan pemerintah dan pemerintah daerah berbasis penelitian dan kebijakan	1,00%	8,00%			
3.5	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Dikti	Menguatnya tata kelola dan sistem pengendalian di lingkungan Ditjen Dikti dan di perguruan tinggi (PT)	Persentase PT BHMN bersertifikat ISO 9001:2008	100,00%	100,00%	Program Pendidikan Tinggi	Kementerian Pendidikan Nasional	70.839,9
			Persentase PTN (institut/universitas/sekolah tinggi) bersertifikat ISO 9001:2008	28,60%	100,00%			
			Persentase politeknik negeri bersertifikat ISO 9001:2008	25,90%	100,00%			
			Persentase PTS (institut/universitas/sekolah tinggi) bersertifikat ISO 9001:2008	17,9%	52,9%			
			Persentase PTS (politeknik/akademi) bersertifikat ISO 9001:2008	10,70%	45,70%			
3.6	Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan Tinggi Islam	Meningkatnya APK PTA	APK PTA	2,89%	3,50%	Program Pendidikan Islam	Kementerian Agama	10.009,1
		Membaihnya rasio kesetaraan gender di PT	Rasio APM peserta didik perempuan: laki-laki pada PT	1,12	1,04			
		Terlaksananya Peningkatan Sarana Prasarana Perti Termasuk Pasca Bencana	Sarana Prasarana Pendidikan Tinggi (Lembaga)	53	68			

BIDANG PEMBANGUNAN: SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA
PRIORITAS BIDANG : Peningkatan Akses, Kualitas, dan Relevansi Pendidikan

NO.	FOKUS/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
		Terlaksananya Pengembangan Perpustakaan dan ICT	Perpustakaan dan ICT (Unit)	0	62			
		Terlaksananya Penelitian pada PTAN	Lembaga Peneliti (Lembaga)	53	53			
		Terlaksananya Pembangunan Gedung PTAN	Gedung Pendidikan Tinggi Agama (Lembaga)	4	4			
		Terlaksananya Pengabdian Masyarakat Berbasis Program	Pengabdian Masyarakat Berbasis Program (Lembaga)	53	53			
3.7	Penyediaan Subsidi Pendidikan Tinggi Islam	Tersedianya Beasiswa Mahasiswa Miskin	Mahasiswa Miskin Penerima Beasiswa (Orang)	59.538	59.538	Program Pendidikan Islam	Kementerian Agama	788,5
		Terlaksananya Beasiswa S1 santri berprestasi	Beasiswa S1 santri berprestasi (Orang)	2.035	2.535			

BIDANG PEMBANGUNAN: SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA
PRIORITAS BIDANG : Peningkatan Akses, Kualitas, dan Relevansi Pendidikan

NO.	FOKUS/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
3.8	Peningkatan Mutu dan Kesejahteraan Dosen dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Tinggi Islam	Tersedianya Tunjangan Profesi Dosen Non PNS	Profesi Dosen Non PNS (Orang)	400	600	Program Pendidikan Islam	Kementerian Agama	2.021,4
		Tersedianya Tunjangan Profesi Dosen PNS	Profesi Dosen PNS (Orang)	3.864	13.864			
		Tersedianya Tunjangan Profesi Dosen Non PNS Guru Besar	Profesi Dosen Non PNS Guru Besar (Orang)	430	430			
		Terlaksananya Beasiswa Dosen Program S2	Dosen PTAI yang S2 (Orang)	600	2.900 ^{k)}			
		Terlaksananya Beasiswa Dosen Program S3	Dosen PTAI yang S3 (Orang)	200	450			
		Terlaksananya Kualifikasi Dosen Program S2/S3	Dosen Program S2/S3 (Dosen)	1.250	6.250 ^{k)}			
		Terlaksananya Percepatan Sertifikasi Dosen	Dosen yang tersertifikasi (Dosen)	4.000	17.000 ^{k)}			

BIDANG PEMBANGUNAN: SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA
PRIORITAS BIDANG : Peningkatan Akses, Kualitas, dan Relevansi Pendidikan

NO.	FOKUS/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
		Terlaksananya Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama dan Keagamaan	Kualitas Pendidikan Agama dan Keagamaan (Lokasi)	34	34			
		Terlaksananya Peningkatan Mutu dan Kesejahteraan Pendidik dan Pengawas Pendidikan Agama Islam	Kualitas dan kesejahteraan Pendidik dan Pengawas (Prop)	0	33			
4	Peningkatan Profesionalisme dan Distribusi Guru dan Tenaga Kependidikan	Tersedianya Kemerataan Guru dan Tenaga Kependidikan yang Bermutu Antarprovinsi, Kabupaten, dan Kota	Persentase guru SD/SDLB berkualifikasi akademik S1/D4	35,60%	88,00%		Kemendiknas, Kemenag	114.386,4
			Persentase guru SMP/SMPLB berkualifikasi akademik S1/D4	77,10%	98,00%			
			Persentase guru SMA/SMLB berkualifikasi akademik S1/D4	92,20%	98,00%			
			Persentase guru SMK berkualifikasi akademik S1/D4	0,876	0,98			
			Persentase kab/kota yang telah memiliki rasio pendidik dan peserta didik SD 1:32	48%	100%			

BIDANG PEMBANGUNAN: SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA
PRIORITAS BIDANG : Peningkatan Akses, Kualitas, dan Relevansi Pendidikan

NO.	FOKUS/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
			Persentase kab/kota yang telah memiliki rasio pendidik dan peserta didik SMP 1:40	47%	100%			
			Persentase kab/kota yang telah memiliki rasio pendidik dan peserta didik SMA 1:40	22%	34%			
			Persentase kab/kota yang telah memiliki rasio pendidik dan peserta didik SMK 1:40	39%	51%			
			Jumlah guru yang menerima tunjangan khusus	30.000	30.000			
			Persentase guru inti yang mengikuti peningkatan kompetensi dan profesionalisme di berbagai bidang	20,00%	100,00%			
			Persentase tenaga kependidikan yang mengikuti peningkatan kompetensi dan profesionalisme sesuai bidangnya	10,00%	50,00%			

BIDANG PEMBANGUNAN: SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA
PRIORITAS BIDANG : Peningkatan Akses, Kualitas, dan Relevansi Pendidikan

NO.	FOKUS/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
4.1	Penyediaan Guru untuk Seluruh Jenjang Pendidikan	Tersedianya Guru Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah yang Bermutu yang merata antar Provinsi, Kabupaten dan Kota	Persentase guru SD/SDLB berkualifikasi akademik S1/D4	35,60%	88,00%	Program Peningkatan Mutu dan Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Kementerian Pendidikan Nasional	65.101,5
			Persentase guru SMP/SMPLB berkualifikasi akademik S1/D4	77,1%	98,0%			
			Persentase guru SMA/SMLB berkualifikasi akademik S1/D4	92,2%	98,0%			
			Persentase guru SMK berkualifikasi akademik S1/D4	87,6%	98,0%			
			Persentase guru SD/SDLB bersertifikat pendidik	26,30%	80,00%			
			Persentase guru SMP/SMPLB bersertifikat pendidik	44,0%	90,0%			
			Persentase guru SMA/SMLB bersertifikat pendidik	51,0%	90,0%			
			Persentase guru SMK bersertifikat pendidik	44,0%	90,0%			
			Persentase guru SMK bersertifikat kompetensi	18,00%	30,00%			
			Rasio guru perempuan:laki-laki yang bersertifikat pendidik	60,00%	95,00%			
Jumlah guru SD/SDLB penerima tunjangan profesi	120.000	816.167						
Jumlah guru SMP yang menerima tunjangan profesi	75.000	369.496						

BIDANG PEMBANGUNAN: SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA
PRIORITAS BIDANG : Peningkatan Akses, Kualitas, dan Relevansi Pendidikan

NO.	FOKUS/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
			Jumlah guru SMA yang menerima tunjangan profesi	75.000	194.766			
			Jumlah guru SMK yang memperoleh tunjangan profesi	45.000	178.774			
			Jumlah guru yang menerima tunjangan khusus	30.000	30.000			
			Persentase kab/kota yang telah memiliki rasio pendidik dan peserta didik SD 1:32	48,00%	100,00%			
			Persentase kab/kota yang telah memiliki rasio pendidik dan peserta didik SMP 1:40	47,40%	100,00%			
			Persentase kab/kota yang telah memiliki rasio pendidik dan peserta didik SMA 1:40	21,70%	34,30%			
			Persentase kab/kota yang telah memiliki rasio pendidik dan peserta didik SMK 1:40	38,70%	51,40%			
4.2	Pendidik dan Pelatihan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan	Meningkatnya Pembedayaan dan Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase guru inti yang mengikuti peningkatan kompetensi dan profesionalisme di berbagai bidang	20%	100%	Program Peningkatan Mutu dan Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Kementerian Pendidikan Nasional	974,3
			Persentase tenaga kependidikan yang mengikuti peningkatan kompetensi dan profesionalisme sesuai bidangnya	10%	50%			

BIDANG PEMBANGUNAN: SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA
PRIORITAS BIDANG : Peningkatan Akses, Kualitas, dan Relevansi Pendidikan

NO.	FOKUS/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
4.3	Penyediaan Tenaga Kependidikan Formal untuk Seluruh Jenjang Pendidikan	Tersedianya Tenaga Kependidikan PAUD, SD, SMP, SMA, dan SMK Bermutu yang merata di Kabupaten dan Kota	Persentase kepala SD yang sudah mengikuti <i>training</i> kepala sekolah terakreditasi yang berkualifikasi menurut kab/kota	15%	90%	Program Peningkatan Mutu dan Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Kementerian Pendidikan Nasional	435,9
			Persentase pengawas SD yang sudah mengikuti <i>training</i> pengawas terakreditasi yang berkualifikasi menurut kab/kota	10%	90%			
			Persentase kepala SMP yang sudah mengikuti <i>training</i> kepala sekolah terakreditasi yang berkualifikasi menurut kab/kota	15%	100%			
			Persentase pengawas SMP yang sudah mengikuti <i>training</i> pengawas terakreditasi yang berkualifikasi menurut kab/kota	35%	90%			
			Persentase kepala SMA/SMK yang sudah mengikuti <i>training</i> kepala sekolah terakreditasi yang berkualifikasi menurut kab/kota	15%	100%			
			Persentase pengawas SMA/SMK yang sudah mengikuti <i>training</i> pengawas terakreditasi yang berkualifikasi menurut kab/kota	35%	90%			

BIDANG PEMBANGUNAN: SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA
PRIORITAS BIDANG : Peningkatan Akses, Kualitas, dan Relevansi Pendidikan

NO.	FOKUS/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
4.4	Peningkatan mutu dan Pembinaan lembaga diklat dan penjaminan mutu pendidikan	Meningkatnya Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan TK, PAUD, SD, SMP, SMA dan SMK Bermutu yang merata antar Provinsi, Kabupaten dan Kota	Jumlah pengembangan standar, sistem, program, bahan dan model diklat bagi guru per tahun	20	20	Program Peningkatan Mutu dan Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Kementerian Pendidikan Nasional	1.051,2
			Jumlah pengembangan standar, sistem, program, bahan dan model diklat bagi tenaga kependidikan per tahun	20	20			
			Jumlah pengembangan standar, sistem, program, bahan dan model diklat bagi PTK-PNF per tahun	20	20			
4.5	Peningkatan Mutu dan Kesejahteraan Pendidik dan	Terlaksananya Sertifikasi Guru	Guru yang tersertifikasi (Orang)	90.000	480.000 ^{k)}	Program Pendidikan Islam	Kementerian Agama	46.747,7
		Terlaksananya Beasiswa guru Program S1	Guru madrasah yang S1 (Guru)	3.500	21.000 ^{k)}			
		Membaihnya rasio kesetaraan gender guru	Rasio guru perempuan:laki-laki yang bersertifikat pendidik	60%	95%			
		Terlaksananya Kualifikasi Guru Program S2	Guru madrasah yang S2 (Guru)	2.000	12.000 ^{k)}			

BIDANG PEMBANGUNAN: SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA
PRIORITAS BIDANG : Peningkatan Akses, Kualitas, dan Relevansi Pendidikan

NO.	FOKUS/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
		Terlaksananya Bantuan Peningkatan Kualifikasi Guru Program S1	Guru madrasah yang S1 (Guru)	10.800	57.000 ^{k)}			
		Terlaksananya Kualifikasi Guru melalui Dual Mode	Kualifikasi Guru madrasah (Guru)	10.000	53.000 ^{k)}			
		Terlaksananya Beasiswa kompetensi ganda guru dalam jabatan	Beasiswa guru kompetensi ganda (Guru)	2.800	14.000 ^{k)}			
		Terlaksananya Sertifikasi Guru dalam jabatan melalui jalur pendidikan	Sertifikasi guru melalui beasiswa (Guru)	2.400	13.500 ^{k)}			
		Terlaksananya Kualifikasi Guru Program S2	Guru madrasah yang S2 (Guru)	2.000	12.000 ^{k)}			

BIDANG PEMBANGUNAN: SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA
PRIORITAS BIDANG : Peningkatan Akses, Kualitas, dan Relevansi Pendidikan

NO.	FOKUS/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
		Terlaksananya subsidi tunjangan fungsional Guru Non -	Tunjangan fungsional Guru Non - PNS (Orang) Sudah S1	184.311	184.311			
			Tunjangan fungsional Guru Non - PNS (Orang) Belum S1	275.037	275.037			
		Terlaksananya Pembayaran Tunjangan Profesi Guru Non PNS	Tunjangan Profesi Guru Non PNS (orang)	52.144	294.144			
		Terlaksananya Pembayaran Tunjangan Profesi Guru PNS	Tunjangan Profesi Guru PNS (Orang)	87.691	235.691			
		Terlaksananya Pembayaran Tunjangan Khusus Guru	Tunjangan Khusus Guru (Orang)	3.500	3.500			
4.6	Peningkatan Mutu dan Kesejahteraan Pendidik dan Pengawas Pendidikan Agama Islam	Terlaksananya Peningkatan Mutu dan Kesejahteraan Pendidik dan Pengawas Pendidikan Agama Islam	Kualitas dan kesejahteraan Pendidik dan Pengawas (Provinsi)	-	33	Program Pendidikan Islam	Kementerian Agama	75,9

BIDANG PEMBANGUNAN: SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA
PRIORITAS BIDANG : Peningkatan Akses, Kualitas, dan Relevansi Pendidikan

NO.	FOKUS/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
5	Peningkatan Kualitas dan Relevansi Pendidikan Non Formal	Tercapainya Keluasan dan Kemerataan Akses Pendidikan Nonformal yang Bermutu dan Relevan dengan Kebutuhan Masyarakat	Persentase Buta Aksara Usia ≥ 15 Tahun	5,44%	4,18%		Kemendiknas, Kemenag	9.421,1
			APK Paket A	0,56%	0,57%			
			APK Paket B	3,75%	3,75%			
			APK Paket C	1,99%	2,22%			
5.1	Penyediaan Layanan Pendidikan Masyarakat	Meningkatnya tingkat literasi yang berkesetaraan gender di Kabupaten dan Kota	Persentase Buta Aksara Usia ≥ 15 Tahun	5,44%	4,18%	Program Pendidikan Nonformal dan Informal	Kementerian Pendidikan Nasional	2.182,2

BIDANG PEMBANGUNAN: SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA
PRIORITAS BIDANG : Peningkatan Akses, Kualitas, dan Relevansi Pendidikan

NO.	FOKUS/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
5.2	Penyediaan Layanan Pendidikan Kesetaraan	Terciptanya Perluasan dan pemerataan akses pendidikan kesetaraan Paket A, Paket B, Paket C dan bagi orang Dewasa bermutu, berkesetaraan gender dan relevan dengan kebutuhan masyarakat di semua kabupaten/kota untuk bekerja pada dunia usaha dan dunia industri terkait dan atau usaha mandiri (wirausaha)	APK Paket A	0,56%	0,57%	Program Pendidikan Nonformal dan Informal	Kementerian Pendidikan Nasional	4.147,6
			APK Paket B	3,75%	3,75%			
			APK Paket C	1,99%	2,22%			

BIDANG PEMBANGUNAN: SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA
PRIORITAS BIDANG : Peningkatan Akses, Kualitas, dan Relevansi Pendidikan

NO.	FOKUS/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
5.3	Penyelenggaraan Kursus dan Pelatihan	Terciptanya Perluasan dan Pemerataan Akses Kursus dan pendidikan <i>life skill</i> Bermutu, Berkesetaraan gender, dan Relevan dengan Kebutuhan Masyarakat, di Semua Kabupaten/ Kota	Persentase anak putus sekolah dan lulus sekolah menengah tidak melanjutkan mendapatkan layanan pendidikan keterampilan berbasis kecakapan hidup, bersertifikat dan bekerja	5,00%	30,00%	Program Pendidikan Nonformal dan Informal	Kementerian Pendidikan Nasional	1.847,1
			Jumlah lembaga sertifikasi kompetensi (LSK) yang dibentuk	20	40			
			Persentase jenis keterampilan/keahlian yang dapat dilayani uji kompetensi oleh lembaga sertifikasi kompetensi (LSK)	10%	30%			
5.4	Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan Keagamaan Islam	Terlaksananya Operasional Penyelenggaraan Paket A dan B	Penyelenggaraan Paket A dan B (Lembaga)	928	1.160	Program Pendidikan Islam	Kementerian Agama	1.244,1
			Terlaksananya Penyelenggaraan PPS Program Wajar Dikdas pada Pontren	8.027	8.027			
			Terselenggaranya Pembelajaran Paket C Pontren dan Lembaga Pendidikan Keagamaan	300	350			

BIDANG PEMBANGUNAN: SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA
PRIORITAS BIDANG : Peningkatan Akses, Kualitas, dan Relevansi Pendidikan

NO.	FOKUS/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
		Terlaksananya Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama dan Keagamaan	Kualitas Pendidikan Agama dan Keagamaan (Lokasi)	34	34			
6	Peningkatan Minat Baca dan Budaya Gemar Membaca Masyarakat	Meningkatnya Layanan Perpustakaan, Pelestarian Fisik dan Kandungan Naskah Kuno dan Budaya Gemar Membaca di Masyarakat	Jumlah pengunjung perpustakaan (juta)	4,4	23,3 ^{k)}		Perpusnas; Kemenbudpar; Kemendiknas, Kemendagri, dan Pemda	1.345,4
			Jumlah koleksi perpustakaan nasional	1,8	2,2	Program Pengembangan Perpustakaan		
			Jumlah perpustakaan di Indonesia yang dikelola sesuai standar	42	100	Program Pengembangan Perpustakaan		
6.1	Pendidikan dan Pelatihan Perpustakaan	Meningkatnya kompetensi SDM perpustakaan	Jumlah peserta diklat perpustakaan	700	4.100 ^{k)}	Program Pengembangan Perpustakaan	Perpusnas	35,4
			Jumlah diklat yang diakreditasi dan dievaluasi	15	122 ^{k)}			

BIDANG PEMBANGUNAN: SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA
PRIORITAS BIDANG : Peningkatan Akses, Kualitas, dan Relevansi Pendidikan

NO.	FOKUS/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
6.2	Pengembangan Pustakawan	Meningkatnya kompetensi Pustakawan	Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat	-	464 ^{k)}	Program Pengembangan Perpustakaan	Perpusnas	26,1
			Jumlah pedoman dan standar kompetensi	10	50 ^{k)}			
6.3	Pengembangan Koleksi Perpustakaan Nasional	Meningkatnya koleksi Perpustakaan Nasional	Jumlah penyediaan bahan pustaka	131.000	708.000 ^{k)}	Program Pengembangan Perpustakaan	Perpusnas	105,7
			Jumlah pengolahan bahan pustaka	75.000	435.000 ^{k)}			
			Jumlah pedoman pengolahan bahan pustaka	14	74 ^{k)}			
			Jumlah data bibliografi dan <i>authority</i>	75.000	435.000 ^{k)}			
			Jumlah perpustakaan di Indonesia yang dikelola sesuai standar	42	100			
6.4	Pengelolaan Deposit Terbitan Nasional	Meningkatnya pengelolaan dan pendayagunaan terbitan nasional hasil pelaksanaan UU Karya Cetak dan Karya Rekam	Jumlah terbitan nasional dan internasional yang terhimpun dan terkelola.	81.520	407.600 ^{k)}	Program Pengembangan Perpustakaan	Perpusnas	26,1
			Jumlah terbitan nasional yang terdata dalam Bibliografi Nasional (BNI) dan Katalog Induk Nasional (KIN)	2.500	12.500 ^{k)}			
			Jumlah judul buku terhimpun dalam Katalog Dalam Terbitan (KDT), International Standard Book Number (ISBN) dan International Serial Music Number (ISMN)	2.500	12.500 ^{k)}			
			Jumlah Sosialisasi Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (UU No.4 Tahun 1990)	5	25 ^{k)}			

BIDANG PEMBANGUNAN: SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA
PRIORITAS BIDANG : Peningkatan Akses, Kualitas, dan Relevansi Pendidikan

NO.	FOKUS/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
6.5	Preservasi dan Konservasi Bahan Pustaka dan Naskah Kuno	Meningkatnya kualitas pengelolaan dan pelestarian fisik dan kandungan informasi bahan pustaka dan naskah kuno	Jumlah fisik dan kandungan informasi bahan pustaka serta naskah kuno yang dilestarikan	157.650	231 ^{k)}	Program Pengembangan Perpustakaan	Perpusnas	55,4
			Jumlah naskah pedoman teknis preservasi bahan pustaka	15	75 ^{k)}			
			Intensitas sosialisasi preservasi bahan pustaka	2	14 ^{k)}			
6.6	Peningkatan Layanan Jasa Perpustakaan dan Informasi	Meningkatnya kegiatan layanan jasa perpustakaan dan informasi yang didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai	Jumlah perpustakaan provinsi yang memiliki perangkat e-library	33	33	Program Pengembangan Perpustakaan	Perpusnas	212,2
			Jumlah Kab/kota menjadi jejaring dan memiliki perangkat perpustakaan digital (<i>e-library</i>)	-	150 ^{k)}			
			Jumlah pemustaka yang memanfaatkan Perpustakaan (juta orang)	2	17 ^{k)}			
			Jumlah naskah kuno/manuskrip (yang diinventarisasi, ditranslasi, ditransliterasi, dan ditransmedia)-(%)	5	10			

BIDANG PEMBANGUNAN: SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA
PRIORITAS BIDANG : Peningkatan Akses, Kualitas, dan Relevansi Pendidikan

NO.	FOKUS/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
6.7	Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Gemar Membaca	Meningkatnya upaya pengembangan perpustakaan dan budaya gemar membaca	Jumlah perpustakaan sesuai dengan standar/tipologi perpustakaan	-	350	Program Pengembangan Perpustakaan	Perpusnas	843,9
			Jumlah pedoman dan standar perpustakaan	28	140 ^{k)}			
			Jumlah kajian perpustakaan dan pembudayaan gemar membaca	5	36 ^{k)}			
			Jumlah promosi pembudayaan gemar membaca	10	60 ^{k)}			
			Jumlah perpustakaan keliling (mobil, dan kapal)	88	220 ^{k)}			
			Jumlah perpustakaan umum yang dikembangkan	2.283	12.833 ^{k)}			
			Provinsi	33	33			
			Kabupaten/Kota	250	350 ^{k)}			
Desa/Kelurahan	2.000	12.450 ^{k)}						

BIDANG PEMBANGUNAN: SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA
PRIORITAS BIDANG : Peningkatan Akses, Kualitas, dan Relevansi Pendidikan

NO.	FOKUS/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
6.8	Pengelolaan Perpustakaan Proklamator	Meningkatnya kualitas penunjang layanan perpustakaan proklamator	Jumlah pengunjung perpustakaan Proklamator	415.959	2.346.414 ^{k)}	Program Pengembangan Perpustakaan	Perpusnas	40,6
			Jumlah koleksi perpustakaan Proklamator	100.713	568.122 ^{k)}			
7	Peningkatan Akses Dan Kualitas Pendidikan Anak Usia Dini	Tercapainya Keluasan Dan Kemerataan Akses Pendidikan Anak Usia Dini	APK PAUD	56,70%	72,90%		Kemendiknas	8.083,6
			Persentase satuan TK/TKLB berakreditasi	55,60%	85,00%			
7.1	Penyediaan Layanan Pendidikan TK	Tercapainya Keluasan dan Kemerataan Akses TK Bermutu dan Berkesetaraan gender di Semua Kabupaten dan Kota	APK TK/TKLB	30,62%	36,58%	Program Pendidikan Taman Kanak-kanak dan Pendidikan Dasar	Kementerian Pendidikan Nasional	2.322,4
			Provinsi ber-APM > 36,58%	19,85%	75,00%			
			Rasio jumlah peserta didik TK perempuan: laki-laki	>0,98	>0,98			
			Persentase TK berakreditasi	56	85			

BIDANG PEMBANGUNAN: SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA
PRIORITAS BIDANG : Peningkatan Akses, Kualitas, dan Relevansi Pendidikan

NO.	FOKUS/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
7.2	Penyediaan Layanan PAUD Nonformal	Terciptanya Keluasan dan pemerataan Akses PAUD Non Formal Bermutu dan Berkesetaraan gender di Kabupaten dan Kota	APK PAUD nonformal	11,30%	13,83%	Program Pendidikan Nonformal dan Informal	Kementerian Pendidikan Nasional	5.761,3
			Persentase PAUD non formal berakreditasi	-	15%			
8	Peningkatan Kualitas Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan	Meningkatnya kualitas pendidikan agama dan keagamaan	Cakupan kegiatan peningkatan kualitas pendidikan agama dan pendidikan keagamaan (lokasi)	34	34		Kementerian Agama	4.137,0
8.1	Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan Agama Islam pada Sekolah	Terlaksananya Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama dan Keagamaan	Kualitas Pendidikan Agama dan Keagamaan (Lokasi)	34	34	Program Pendidikan Islam	Kementerian Agama	1.015,0
8.2	Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Kristen	Terlaksananya Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama dan Keagamaan	Kualitas Pendidikan Agama dan Keagamaan (Lokasi)	34	34	Program Bimbingan Masyarakat Kristen	Kementerian Agama	1.305,0

BIDANG PEMBANGUNAN: SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA
PRIORITAS BIDANG : Peningkatan Akses, Kualitas, dan Relevansi Pendidikan

NO.	FOKUS/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
8.3	Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Katolik	Terlaksananya Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama dan Keagamaan	Kualitas Pendidikan Agama dan Keagamaan (Lokasi)	34	34	Program Bimbingan Masyarakat Katolik	Kementerian Agama	536,0
8.4	Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Hindu	Terlaksananya Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama dan Keagamaan	Kualitas Pendidikan Agama dan Keagamaan (Lokasi)	34	34	Program Bimbingan Masyarakat Hindu	Kementerian Agama	819,0
8.5	Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan dan Urusan Agama Budha	Terlaksananya Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama dan Keagamaan	Kualitas Pendidikan Agama dan Keagamaan (lokasi)	34	34	Program Bimbingan Masyarakat Buddha	Kementerian Agama	462,0

BIDANG PEMBANGUNAN: SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA
PRIORITAS BIDANG : Peningkatan Akses, Kualitas, dan Relevansi Pendidikan

NO.	FOKUS/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
9	Pemantapan pelaksanaan sistem pendidikan nasional	Makin mantapnya pelaksanaan sistem pendidikan nasional	Rata-rata lama sekolah (tahun)	7,6	8,25		Kemendiknas, Kemenag, dan K/L penyelenggara fungsi pendidikan	27.892,5
			Persentase mata pelajaran SD/ sederajat yang buku teksnya telah dibeli hak ciptanya (total 78 jilid mapel)	100%	100% ^{k)}			
			Persentase mata pelajaran SMP/ sederajat yang buku teksnya telah dibeli hak ciptanya (total 47 jilid mapel)	100%	100% ^{k)}			
			Persentase mata pelajaran SMA/ sederajat yang buku teksnya telah dibeli hak ciptanya (total 93 jilid mapel)	100%	100% ^{k)}			
			Persentase mata pelajaran SMK yang buku teksnya telah dibeli hak ciptanya (total 493 jilid mapel)	52%	100%			
			Jumlah titik terkoneksi jardiknas	33.140	200.000			

BIDANG PEMBANGUNAN: SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA
PRIORITAS BIDANG : Peningkatan Akses, Kualitas, dan Relevansi Pendidikan

NO.	FOKUS/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
9.1	Penyediaan Buku Ajar yang Bermutu dan Murah serta Pembinaan, Pengembangan, Kegrafikaan dan Pendidikan	Tersedianya Buku Ajar yang Bermutu dan Murah	Persentase mata pelajaran SD yang buku teksnya telah dibeli hak ciptanya (total 78 jilid mapel)	100%	100% ^{k)}	Program Dukungan Manajemen dan pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya di Sekretariat Jenderal Kemendiknas	Kementerian Pendidikan Nasional	610,2
			Persentase mata pelajaran SMP yang buku teksnya telah dibeli hak ciptanya (total 47 jilid mapel)	100%	100% ^{k)}			
			Persentase mata pelajaran SMA yang buku teksnya telah dibeli hak ciptanya (total 93 jilid mapel)	100%	100% ^{k)}			
			Persentase mata pelajaran SMK yang buku teksnya telah dibeli hak ciptanya (total 493 jilid mapel)	52%	100%			
9.2	Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendayagunaan e-Pembelajaran Dan e-Administrasi Pada Semua Satuan Pendidikan Dan Satuan Kerja	Tersedianya Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendayagunaan e-Pembelajaran dan e-Administrasi pada Semua Satuan Pendidikan dan Satuan Kerja	Jumlah titik terkoneksi jardiknas	33.140	200.000	Program Dukungan Manajemen dan pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya di Sekretariat Jenderal Kemendiknas	Kementerian Pendidikan Nasional	3.088,8
			Jumlah satuan pendidikan yang memanfaatkan e-Pembelajaran	41.020	185.000			
			Jumlah satuan kerja yang memanfaatkan e-Administrasi	34.623	107.939			

BIDANG PEMBANGUNAN: SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA
PRIORITAS BIDANG : Peningkatan Akses, Kualitas, dan Relevansi Pendidikan

NO.	FOKUS/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
9.3	Penyediaan Sistem Pembelajaran, Penyempurnaan Kurikulum Pendidikan Dasar dan Menengah serta Pembelajaran	Tersedianya Model Kurikulum dan Pembelajaran serta Kurikulum dan Pembelajaran PAUD, DIKDAS, DIKMEN, dan Pendidikan orang dewasa.	Jumlah model kurikulum SD/MI yang dihasilkan	1	17 ^{k)}	Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan Nasional	Kementerian Pendidikan Nasional	328,5
			Jumlah model kurikulum SMP/MTs yang dihasilkan	1	13 ^{k)}			
			Jumlah model kurikulum SMA/MA yang dihasilkan	1	3			
			Jumlah model kurikulum SMK yang dihasilkan	1	5			
			Persentase penerapan kurikulum sekolah dasar-menengah yang disempurnakan	10,0%	100,0%			
9.4	Penyediaan Informasi Hasil Penilaian Pendidikan	Tersedianya Informasi Penilaian Kualitas PAUD, DIKDAS, DIKMEN, dan Pendidikan Orang Dewasa	Kesesuaian sistem ujian akhir nasional dengan memperhatikan kemampuan sosial, watak, budi pekerti, kecintaan terhadap budaya-bahasa indonesia	80,0%	100,0%	Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan Nasional	Kementerian Pendidikan Nasional	238,0

BIDANG PEMBANGUNAN: SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA
PRIORITAS BIDANG : Peningkatan Akses, Kualitas, dan Relevansi Pendidikan

NO.	FOKUS/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
9.5	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pendidikan TK dan Pendidikan Dasar	Menguatnya tata kelola dan sistem pengendalian manajemen di Ditjen MPDM	Persentase komite sekolah yang berfungsi efektif	75,0%	95,0%	Program Pendidikan Taman Kanak-kanak dan Pendidikan Dasar	Kementerian Pendidikan Nasional	1.319,6
			Peran serta masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pendanaan pendidikan melalui dewan pendidikan	meningkat	meningkat			
9.6	Pendidikan dan Pelatihan Perhubungan Darat, Laut dan Udara	Terselenggaranya Pendidikan Perhubungan Darat, Laut dan Udara	Jumlah Peserta	85.691	141.941	Program Pendidikan dan Pelatihan Perhubungan	Kemenhub	15.229,0
9.7	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Tri Dharma Perguruan Tinggi STPN	Terselenggaranya Tri Dharma Perguruan Tinggi, dan Peningkatan Kualitas Program Studi pada STPN	Jumlah Lulusan Tugas Belajar Dosen dan Staf Administrasi Pasca Sarjana S-2 dan S-3 (orang)	0	15	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya di BPN	Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional	87,4
			Jumlah Lulusan Mahasiswa Sarjana sains Terapan Bidang Pertanahan (orang)	80	80			
			Meningkatnya Status Program Diploma IV Pertanahan STPN dan Prodi lainnya, serta status Lembaga STPN (nilai)	B	A			
			Jumlah Penelitian Pelaksanaan Tri Dharma PT dan Pengabdian kepada Masyarakat (paket)	25	25			

BIDANG PEMBANGUNAN: SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA
PRIORITAS BIDANG : Peningkatan Akses, Kualitas, dan Relevansi Pendidikan

NO.	FOKUS/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
9.8	Penyelenggaraan Diploma BMKG	Terselenggaranya Pendidikan Profesional Program Diploma Bidang Keahlian Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika	Persentase taruna jurusan meteorologi, klimatologi, geofisika dan radio teknik yang lulus	-	100%	Pendidikan Tinggi (2010)/ Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya BMKG	Akademi Meteorologi dan Geofisika, BMKG	96,5
9.9	Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Pertahanan	Meningkatnya Kualitas Pendidikan Tinggi Bidang Pertahanan	Jumlah Peserta Perkuliahan Universitas Pertahanan dan Kecukupan Sarana dan Prasarannya	40%	43,00%	Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kemenhan	Kemenhan	230,0
9.10	Pendidikan Kelautan dan Perikanan	Terpenuhinya Tenaga Terdidik Kompeten Sesuai Standar dan Kebutuhan Serta Prioritas Nasional	Jumlah lulusan pendidikan yang Kompeten Sesuai Standar dan Kebutuhan serta Prioritas Nasional (orang)	1.400	7.000 ^{k)}	Program Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan	DKP	962,0

BIDANG PEMBANGUNAN: SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA
PRIORITAS BIDANG : Peningkatan Akses, Kualitas, dan Relevansi Pendidikan

NO.	FOKUS/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
9.11	Pengembangan Pendidikan Tinggi Bidang Pariwisata	Meningkatnya profesionalisme dan daya saing SDM bidang Pariwisata di 4 UPT Pendidikan Tinggi Pariwisata Kemenbudpar	Jumlah program studi	34	42	Pengembangan Sumber Daya Kebudayaan dan Pariwisata	Kemenbudpar	1.089,0
			Jumlah dosen (orang)	390	500			
			Jumlah mahasiswa aktif (orang)	3.780	5.860			
			Jumlah lulusan pendidikan kepariwisataan (orang) di 4 UPT Pendidikan Tinggi Pariwisata Kemenbudpar	1.241	1.498			
9.12	Pengembangan Pendidikan Vokasi Industri	Terciptanya SDM industri terampil siap kerja	Jumlah lulusan SDM terampil (orang)	1.100	1.800	Program Peningkatan Kualitas SDM Industri	Kemenperin	266,0
			Jumlah siswa SMK (orang)	4.000	7.500			
			Rata-rata Akreditasi	A	A			
		Terciptanya SDM industri ahli madya sesuai dengan kebutuhan industri	Jumlah lulusan SDM ahli madya (orang)	1.360	1.700	Program Peningkatan Kualitas SDM Industri	Kemenperin	453,0
			Jumlah mahasiswa SMK (orang)	5.300	9.400			
			Rata-rata Akreditasi	B	A			

BIDANG PEMBANGUNAN: SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA
PRIORITAS BIDANG : Peningkatan Akses, Kualitas, dan Relevansi Pendidikan

NO.	FOKUS/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
9.13	Penyelenggaraan Pendidikan Teknologi Nuklir (STTN)	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan Teknologi Nuklir	Jumlah Lulusan (orang)	120	75	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya	BATAN	20,0
			Jumlah makalah nasional dan internasional (Paper)	18	30			
9.14	Pengembangan SDM melalui penyelenggaraan pendidikan Program Diploma Keuangan Negara	Mengembangkan SDM yang berintegritas dan berkompensi tinggi	Jumlah peserta edukasi publik tentang Keuangan Negara	4.800	5.260	Pengembangan SDM Keuangan dan Kekayaan Negara yang Profesional melalui Pendidikan dan Pelatihan	Kemenkeu	470,9
		Meningkatkan pemahaman masyarakat dan pelaku ekonomi akan fungsi Kementerian Keuangan	Jumlah kerjasama pendidikan dan pelatihan skala nasional, regional dan internasional	5	8			
9.15	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kementerian Kehutanan dan Sumber Daya Manusia Kehutanan	Meningkatnya kualitas dan kapasitas SDM Kementerian Kehutanan serta SDM kehutanan lainnya (Pemda dan Masyarakat)	Penyelenggaraan SMK Kehutanan (siswa)	285	1.440	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Kehutanan	Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan, Kementerian Kehutanan	711,0
			Karyasiswa lulus Studi S2/S3 (orang)	65	325			

BIDANG PEMBANGUNAN: SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA
PRIORITAS BIDANG : Peningkatan Akses, Kualitas, dan Relevansi Pendidikan

NO.	FOKUS/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
9.16	Pengembangan reorientasi pendidikan pertanian	Mengembangkan program pendidikan pertanian	Jumlah jenis profesi SDM pertanian yang terstandarisasi dan tersertifikasi (jenis)	3	3	Pengembangan SDM Pertanian dan Kelembagaan Petani	Kementan	497,5
		Mengembangkan kelembagaan pendidikan pertanian	Jumlah kelembagaan pendidikan yang ditingkatkan kualitasnya (lembaga)	25	25			
			Jumlah lulusan D4 di bidang RIHP	750	600			
9.17	Pengembangan kerjasama dan kemitraan pemuda	Meningkatnya kemitraan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan layanan kepemudaan	1. Jumlah koordinasi dan kemitraan kepemudaan lintas sektor tingkat pusat,	25	25	Pelayanan Kepemudaan	Kemeneqpora	68,0
9.18	Peningkatan wawasan pemuda	Meningkatnya wawasan pemuda kader di bidang kebangsaan, perdamaian, dan lingkungan hidup	1. Jumlah pemuda yang difasilitasi dalam peningkatan wawasan kebangsaan, perdamaian, dan lingkungan hidup,	5.500	7.500	Pelayanan Kepemudaan	Kemeneqpora	55,0

BIDANG PEMBANGUNAN: SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA
PRIORITAS BIDANG : Peningkatan Akses, Kualitas, dan Relevansi Pendidikan

NO.	FOKUS/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
9.19	Peningkatan Kapasitas Pemuda	Meningkatnya kapasitas pemuda kader di bidang seni, budaya, iptek serta iman dan takwa	1. Jumlah pemuda kader yang difasilitasi dalam peningkatan kapasitas di bidang seni budaya, iptek, dan imtak	3.180	3.180	Pelayanan Kepemudaan	Kemeneppora	68,0
9.20	Peningkatan potensi sumberdaya pemuda	Meningkatnya inventarisasi potensi sumberdaya kepemudaan	1. Jumlah fasilitasi inventarisasi potensi sumber daya kepemudaan,	66	66	Pelayanan Kepemudaan	Kemeneppora	38,0
9.21	Pemberdayaan organisasi kepemudaan	Meningkatnya kapasitas pengelolaan organisasi kepemudaan	1. Jumlah pengelola organisasi kepemudaan yang dilatih kepemimpinan, manajemen, dan perencanaan program,	6.000	10.000	Pelayanan Kepemudaan	Kemeneppora	37,0
			2. Jumlah organisasi kepemudaan yang memenuhi kualifikasi berdasarkan standar organisasi kepemudaan,	98	140			

BIDANG PEMBANGUNAN: SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA
PRIORITAS BIDANG : Peningkatan Akses, Kualitas, dan Relevansi Pendidikan

NO.	FOKUS/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
9.22	Pengembangan Kepanduan	Terlaksananya pendidikan, pengembangan dan pemasyarakatan kepanduan	1. Jumlah peserta pendidikan kepemudaan	500	1.500	Pelayanan Kepemudaan	Kemeneppora	275,0
			2. Jumlah naskah kebijakan kepramukaan,	3	1			
9.23	Pengembangan Kepemimpinan pemuda	Meningkatnya kapasitas dan potensi kepemimpinan pemuda	1. Jumlah pemuda kader kepemimpinan,	4.500	11.500	Pelayanan Kepemudaan	Kemeneppora	71,0
9.24	Pengembangan Kepedulian Pemuda	Meningkatnya kepedulian dan kepekaan sosial terhadap masyarakat dan lingkungan	1. Jumlah sarjana kader pembangunan perdesaan;	3.000	3.000	Pelayanan Kepemudaan	Kemeneppora	40,0
			2. Jumlah kader kesukarelawan di daerah tertinggal, daerah bencana, dan daerah konflik	299	750			
9.25	Pengembangan Kewirausahaan Pemuda	Meningkatnya kapasitas dan potensi kewirausahaan pemuda	1. Jumlah pemuda kader kewirausahaan,	3.175	3.500	Pelayanan Kepemudaan	Kemeneppora	71,0

BIDANG PEMBANGUNAN: SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA
PRIORITAS BIDANG : Peningkatan Akses, Kualitas, dan Relevansi Pendidikan

NO.	FOKUS/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
9.26	Pengembangan kreativitas dan kualitas pemuda	Meningkatnya kreativitas pemuda kader di bidang seni, budaya, dan industri kreatif	1. Jumlah pemuda kader yang difasilitasi dalam peningkatan kapasitas di bidang keimanan, ketakwaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi	3.180	3.180	Pelayanan Kepemudaan	Kemenegpora	35,0
9.27	Pengembangan kepeloporan pemuda	Meningkatnya kapasitas dan potensi kepeloporan pemuda	1. Jumlah pemuda kader pelopor,	1.000	3.000	Pelayanan Kepemudaan	Kemenegpora	83,0
9.28	Peningkatan prasarana dan sarana kepemudaan	Meningkatnya pemanfaatan dan penyediaan prasarana dan sarana kepemudaan	1. Jumlah fasilitasi penyediaan prasarana dan sarana kepemudaan,	300	400	Pelayanan Kepemudaan	Kemenegpora	64,0
			2. Jumlah fasilitasi sentra pemberdayaan pemuda	33	33			
9.29	Peningkatan pelayanan sentra pemberdayaan pemuda	Meningkatnya pelayanan pendidikan dan pelatihan bidang kepemudaan (PP PON)	Jumlah fasilitasi pelayanan pendidikan dan pelatihan.	20	40	Pelayanan Kepemudaan	Kemenegpora	28,0

BIDANG PEMBANGUNAN: SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA
PRIORITAS BIDANG : Peningkatan Akses, Kualitas, dan Relevansi Pendidikan

NO.	FOKUS/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
9.30	Pengembangan olahraga pendidikan	Meningkatnya kapasitas pelatih olahraga, sarana olahraga dan penyelenggaraan kompetisi olahraga pendidikan	1. Jumlah pelatih olahraga pendidikan yang memiliki kompetensi di satuan-satuan pendidikan,	240	250	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga	Kemenegpora	147,0
			2. Jumlah fasilitasi kejuaraan olahraga pendidikan	7	7			
			3. Jumlah fasilitasi sarana olahraga pendidikan	66	66			
			4. Jumlah peserta pendidikan sekolah olahraga	200	200			
9.31	Pengembangan olahraga rekreasi	Meningkatnya fasilitasi penyelenggaraan kejuaraan olahraga rekreasi	1. Jumlah peserta perlombaan olahraga massal,	7.000	10.000	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga	Kemenegpora	57,0
9.32	Peningkatan sarana dan prasarana keolahragaan	Meningkatnya penyediaan prasarana dan sarana keolahragaan yang memenuhi standar kelayakan	1. Jumlah naskah kebijakan penetapan prasarana olahraga nasional,	1	3	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga	Kemenegpora	450,0

BIDANG PEMBANGUNAN: SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA
PRIORITAS BIDANG : Peningkatan Akses, Kualitas, dan Relevansi Pendidikan

NO.	FOKUS/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
9.33	Pengembangan standarisasi keolahragaan	Tersedianya standar nasional keolahragaan	1. Jumlah naskah penyusunan standar nasional keolahragaan,	21	22	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga	Kemenegpora	93,0
9.34	Pengembangan promosi dan penghargaan keolahragaan	Meningkatnya promosi, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pengelolaan, serta penghargaan keolahragaan	1. Jumlah penerima penghargaan keolahragaan,	350	550	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga	Kemenegpora	108,0
			2. Jumlah koordinasi dan kemitraan keolahragaan lintas sektor tingkat pusat,	16	16			
			3. Jumlah koordinasi dan kemitraan keolahragaan antar tingkat pemerintahan dalam rangka sosialisasi dan promosi.	33	33			
9.35	Peningkatan pelayanan iptek, kesehatan dan informasi olahraga	Meningkatnya pelayanan, pengujian dan pemeriksaan kesehatan olahragawan	1. Persentase kepuasan pelanggan,	75	95	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga	Kemenegpora	18,0
			2. Jumlah fasilitasi pelayanan, pengujian dan pemeriksaan kesehatan olahragawan di daerah	33	33			
9.36	Pengembangan sentra keolahragaan	Meningkatnya kapasitas pelaku industri olahraga	1. Jumlah PPLP dan PPLM yang difasilitasi,	54	54	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga	Kemenegpora	39,0
			2. Jumlah pelaku industri olahraga yang memperoleh fasilitasi peningkatan kapasitas manajemen,	60	120			
			3. Jumlah fasilitasi penyelenggaraan sportainment.	7	7			

BIDANG PEMBANGUNAN: SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA
PRIORITAS BIDANG : Peningkatan Akses, Kualitas, dan Relevansi Pendidikan

NO.	FOKUS/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
9.37	Pengembangan olahraga khusus	Meningkatnya kapasitas pelatih/instruktur/pembina olahraga, khusus dan penyelenggaraan kompetisi olahraga khusus	1. Jumlah pelatih/instruktur/pembina olahraga khusus.	100	100	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga	Kemenegpora	50,0
			2. Jumlah koordinasi dan kemitraan keolahragaan antar tingkat pemerintahan dalam rangka sosialisasi dan promosi.	33	33			
9.38	Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya di Program PPSDM Kesehatan	Meningkatnya sarana dan prasarana poltekkes	Jumlah UPT yang ditingkatkan sarana dan prasarananya	30	60	Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan	Kemenkes	785,0
			Jumlah UPT yang mendapatkan biaya operasional	30	60			
9.39	Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan	Meningkatnya residen senior, beasiswa PPSD, beasiswa D4 dan S1, beasiswa instruktur dan manajemen program	Jumlah tenaga kesehatan yang ditingkatkan kemampuannya	2.350	13.000 ^{k)}	Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan	Kemenkes	315,0
TOTAL								461.186,4

KETERANGAN :

^{k)} Angka Kumulatif 5 tahun (2010-2014)

BIDANG PEMBANGUNAN: SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA

PRIORITAS BIDANG: Peningkatan Partisipasi Pemuda, Budaya dan Prestasi Olahraga

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIA N/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010 - 2014 (Rp. Miliar)
				2010	2014			
1	Peningkatan partisipasi dan peran aktif pemuda dalam berbagai bidang pembangunan	Meningkatnya partisipasi dan peran aktif pemuda di berbagai bidang pembangunan	1. Jumlah pengelola organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pelatihan kepemimpinan, manajemen dan perencanaan program, 2. Jumlah pemuda kader yang difasilitasi dalam peningkatan wawasan serta kapasitas di bidang seni budaya, iptek, dan imtaq, 3. Jumlah pemuda kader kepemimpinan, 4. Jumlah pemuda kader kewirausahaan, 5. Jumlah pembina pramuka, penegak, dan pandega yang mendapat fasilitasi pelayanan kepemudaan.	6.000	40.000 ^{K)}			896,4
1.1	Pengembangan Kerjasama dan Kemitraan Kepemudaan	Meningkatnya kemitraan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pelayanan kepemudaan	1. Jumlah koordinasi dan kemitraan kepemudaan lintas sektor tingkat pusat, 2. Jumlah koordinasi dan kemitraan kepemudaan antar tingkat pemerintahan.	25	25	Pelayanan Kepemudaan	Kemenpora	34,2
				6	33 ^{K)}			

BIDANG PEMBANGUNAN: SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA

PRIORITAS BIDANG: Peningkatan Partisipasi Pemuda, Budaya dan Prestasi Olahraga

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIA N/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010 - 2014 (Rp. Miliar)
				2010	2014			
1.2	Peningkatan Wawasan Pemuda	Meningkatnya wawasan pemuda kader di bidang kebangsaan, perdamaian, dan lingkungan hidup	1. Jumlah pemuda yang difasilitasi dalam peningkatan wawasan kebangsaan, perdamaian, dan lingkungan hidup,	5.500	32.500 ^{k)}	Pelayanan Kepemudaan	Kemenpora	40,4
1.3	Peningkatan Kapasitas Pemuda	Meningkatnya kapasitas pemuda kader di bidang seni dan budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta iman dan taqwa	1. Jumlah pemuda kader yang difasilitasi dalam peningkatan kapasitas di bidang iptek dan imtaq.	3.180	15.900 ^{k)}	Pelayanan Kepemudaan	Kemenpora	41,5
1.4	Peningkatan Potensi Sumber Daya Pemuda	Meningkatnya inventarisasi potensi sumber daya kepemudaan	1. Jumlah fasilitasi inventarisasi potensi sumber daya kepemudaan, 2. Jumlah naskah analisa potensi sumberdaya kepemudaan,	66 7	330 35 ^{k)}	Pelayanan Kepemudaan	Kemenpora	34,0
1.5	Pemberdayaan Organisasi Kepemudaan	Meningkatnya kapasitas pengelolaan organisasi kepemudaan	1. Jumlah pengelola organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pelatihan kepemimpinan, manajemen, dan perencanaan program, 2. Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam memenuhi kualifikasi berdasarkan standar organisasi kepemudaan,	6.000 98	40.000 ^{k)} 140	Pelayanan Kepemudaan	Kemenpora	30,4
1.6	Pengembangan Kepanduan	Terlaksananya pendidikan, pengembangan, dan pemasyarakatan kepanduan	1. Jumlah pemuda yang difasilitasi dalam pendidikan kepemudaan, 2. Jumlah pemuda yang difasilitasi dalam pendidikan kepanduan	250 3.100	2.200 ^{k)} 24.000 ^{k)}	Pelayanan Kepemudaan	Kemenpora	412,0

BIDANG PEMBANGUNAN: SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA

PRIORITAS BIDANG: Peningkatan Partisipasi Pemuda, Budaya dan Prestasi Olahraga

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIA N/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010 - 2014 (Rp. Miliar)
				2010	2014			
1.7	Pengembangan Kepemimpinan Pemuda	Meningkatnya kapasitas dan potensi kepemimpinan pemuda	1. Jumlah pemuda kader kepemimpinan,	4.500	38.500 ^{k)}	Pelayanan Kepemudaan	Kemenpora	44,4
1.8	Pengembangan Kepedulian Pemuda	Meningkatnya kepedulian dan kepekaan sosial pemuda terhadap masyarakat dan lingkungan hidup	1. Jumlah sarjana kader pembangunan perdesaan; 2. Jumlah pemuda kader kesukarelawanan di daerah tertinggal, daerah bencana, dan daerah konflik;	3.000 299	3.000 2.649 ^{k)}	Pelayanan Kepemudaan	Kemenpora	39,5
1.9	Pengembangan Kewirausahaan Pemuda	Meningkatnya kapasitas dan potensi kewirausahaan pemuda	1. Jumlah pemuda yang difasilitasi sebagai kader kewirausahaan. 2. Jumlah fasilitasi sentra-sentra kewirausahaan pemuda.	3.175 66	16.575 ^{k)} 66	Pelayanan Kepemudaan	Kemenpora	46,0
1.10	Pengembangan Kreativitas dan Kualitas Pemuda	Meningkatnya kreativitas pemuda kader di bidang seni, budaya, dan industri kreatif.	1. Jumlah pemuda kader yang difasilitasi dalam peningkatan kapasitas di bidang seni, budaya, dan industri kreatif.	3.180	15.900 ^{k)}	Pelayanan Kepemudaan	Kemenpora	34,4
1.11	Pengembangan Kepeloporan Pemuda	Meningkatnya kapasitas dan potensi kepeloporan pemuda	1. Jumlah pemuda kader pelopor.	1.000	10.000 ^{k)}	Pelayanan Kepemudaan	Kemenpora	68,4
1.12	Peningkatan Prasarana dan Sarana Kepemudaan	Meningkatnya pemanfaatan dan penyediaan prasarana dan sarana kepemudaan	1. Jumlah fasilitasi penyediaan prasarana dan sarana kepemudaan. 2. Jumlah fasilitasi sentra pemberdayaan pemuda.	300 33	1.750 ^{k)} 33	Pelayanan Kepemudaan	Kemenpora	43,4

BIDANG PEMBANGUNAN: SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA
PRIORITAS BIDANG: Peningkatan Partisipasi Pemuda, Budaya dan Prestasi Olahraga

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIA N/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010 - 2014 (Rp. Miliar)
				2010	2014			
1.13	Peningkatan Pelayanan Sentra Pemberdayaan Pemuda	Meningkatnya pelayanan pendidikan dan pelatihan di bidang kepemudaan (PP-PON).	Jumlah fasilitasi pelayanan pendidikan dan pelatihan.	33	33	Pelayanan Kepemudaan	Kemenpora	27,9
2	Peningkatan Budaya dan Prestasi Olahraga	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan olahraga dan prestasi olahraga di tingkat regional dan internasional	<p>1. Jumlah pelatih olahraga pendidikan yang memiliki kompetensi di satuan-satuan pendidikan,</p> <p>2. Jumlah peserta perlombaan/ festival/invitasi/kompetisi olahraga rekreasi,</p> <p>3. Jumlah peserta pendidikan sekolah olahraga.</p> <p>4. Jumlah organisasi keolahragaan yang memenuhi standar kelayakan;</p> <p>5. Jumlah tenaga keolahragaan pada cabang olahraga unggulan yang memperoleh fasilitasi peningkatan kompetensi</p> <p>6. Jumlah fasilitasi kejuaraan cabang olahraga unggulan bertaraf internasional</p>	240	1.240 ^{K)}			3.299,2
				7.000	95.000 ^{K)}			
				200	200			
				9	49 ^{K)}			
				388	1.988 ^{K)}			
				125	665 ^{K)}			

BIDANG PEMBANGUNAN: SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA
PRIORITAS BIDANG: Peningkatan Partisipasi Pemuda, Budaya dan Prestasi Olahraga

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIA N/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010 - 2014 (Rp. Miliar)
				2010	2014			
2.1	Pengembangan Olahraga Pendidikan	Meningkatnya kapasitas pelatih olahraga, sarana olahraga dan penyelenggaraan kompetisi olahraga pendidikan	1. Jumlah pelatih olahraga pendidikan yang memiliki kompetensi di satuan-satuan pendidikan, 2. Jumlah fasilitasi kejuaraan olahraga pendidikan, 3. Jumlah fasilitasi sarana olahraga pendidikan. 4. Jumlah peserta pendidikan sekolah olahraga,	240	1.240 ^{k)}	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga	Kemenpora	147,4
				7	35 ^{k)}			
				66	330 ^{k)}			
				200	200			

BIDANG PEMBANGUNAN: SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA
PRIORITAS BIDANG: Peningkatan Partisipasi Pemuda, Budaya dan Prestasi Olahraga

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIA N/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010 - 2014 (Rp. Miliar)
				2010	2014			
2.2	Pengembangan Olahraga Rekreasi	Meningkatnya fasilitasi penyelenggaraan kejuaraan olahraga rekreasi.	1. Jumlah peserta perlombaan olahraga massal, 2. Jumlah peserta festival dan invitasi olahraga tradisional, 3. Jumlah fasilitasi kompetisi olahraga rekreasi.	7.000 660 20	45.000 ^{k)} 4.410 ^{k)} 152 ^{k)}	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga	Kemenpora	56,1
2.3	Peningkatan Prasarana dan Sarana Keolahragaan	Meningkatnya penyediaan prasarana dan sarana keolahragaan yang memenuhi standar kelayakan	1. Jumlah naskah kebijakan penetapan prasarana olahraga nasional, 2. Jumlah fasilitasi penyediaan prasarana olahraga, 3. Jumlah penyediaan sarana olahraga.	1 4 44	9 ^{k)} 24 ^{k)} 274 ^{k)}	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga	Kemenpora	451,1
2.4	Pengembangan Standardisasi Keolahragaan	Tersedianya standar nasional keolahragaan.	1. Jumlah naskah standar nasional keolahragaan, 2. Jumlah pedoman pelaksanaan akreditasi keolahragaan, 3. Jumlah pedoman pelaksanaan sertifikasi keolahragaan.	21 20 16	109 ^{k)} 94 ^{k)} 87 ^{k)}	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga	Kemenpora	94,4

BIDANG PEMBANGUNAN: SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA
PRIORITAS BIDANG: Peningkatan Partisipasi Pemuda, Budaya dan Prestasi Olahraga

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIA N/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010 - 2014 (Rp. Miliar)
				2010	2014			
2.5	Pengembangan Promosi, dan Penghargaan Keolahragaan	Meningkatnya promosi, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pengelolaan, serta penghargaan keolahragaan	1. Jumlah penerima penghargaan keolahragaan, 2. Jumlah koordinasi dan kemitraan keolahragaan lintas sektor tingkat pusat, 3. Jumlah koordinasi dan kemitraan keolahragaan antar tingkat pemerintahan dalam rangka sosialisasi dan promosi.	350 16 33	2.250 ^{k)} 16 165 ^{k)}	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga	Kemenpora	107,6
2.6	Peningkatan Pelayanan Iptek, Kesehatan, dan Informasi Olahraga	Meningkatnya pelayanan, pengujian, dan pemeriksaan kesehatan olahragawan	1. Persentase kepuasan pelanggan, 2. Jumlah fasilitasi pelayanan, pengujian dan pemeriksaan kesehatan olahragawan di daerah.	75 33	95 33	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga	Kemenpora	17,7
2.7	Pengembangan Sentra Keolahragaan	Meningkatnya kapasitas pelaku industri olahraga	1. Jumlah PPLP dan PPLM yang difasilitasi,	54	54	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga	Kemenpora	38,4
			2. Jumlah pelaku industri olahraga yang memperoleh fasilitasi peningkatan kapasitas manajemen, 3. Jumlah fasilitasi penyelenggaraan seni pertunjukkan olahraga.	60 7	480 ^{k)} 35 ^{k)}			

BIDANG PEMBANGUNAN: SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA
PRIORITAS BIDANG: Peningkatan Partisipasi Pemuda, Budaya dan Prestasi Olahraga

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIA N/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010 - 2014 (Rp. Miliar)
				2010	2014			
2.8	Pengembangan Olahraga Khusus	Meningkatnya kapasitas pelatih/instruktur/pembina olahraga, khusus dan penyelenggaraan kompetisi olahraga khusus	1. Jumlah pelatih/instruktur/pembina olahraga khusus. 2. Jumlah fasilitas kejuaraan olahraga khusus.	100 10	500 ^{k)} 50 ^{k)}	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga	Kemenpora	50,0
2.9	Pengembangan Produk Industri Olahraga	Meningkatnya fasilitasi pengembangan produk industri olahraga	1. Jumlah pelaku industri olahraga yang memperoleh fasilitasi peningkatan kapasitas teknik produksi, 2. Jumlah fasilitasi penyelenggaraan kejuaraan olahraga dirgantara, bahari, dan lintas alam.	458 3	2.058 ^{k)} 15 ^{k)}	Pembinaan Olahraga Prestasi	Kemenpora	36,4
2.10	Pembinaan Olahraga Prestasi	Meningkatnya pembinaan olahraga prestasi	1. Jumlah olahragawan andalan nasional, 2. Jumlah fasilitasi pembinaan cabang olahraga unggulan nasional, 3. Jumlah fasilitasi kejuaraan cabang olahraga unggulan bertaraf internasional, 4. Jumlah fasilitasi penyelenggaraan SEA Games dan Para Games pada tahun 2011 5. Jumlah fasilitasi keikutsertaan pada Asian Games, SEA Games, Olympic Games, Asian Para Games, Para Games, dan Paralympic Games	520 25 125 - 2	520 27 135 2 ^{k)} 10 ^{k)}	Pembinaan Olahraga Prestasi	Kemenpora	1.993,1

BIDANG PEMBANGUNAN: SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA
PRIORITAS BIDANG: Peningkatan Partisipasi Pemuda, Budaya dan Prestasi Olahraga

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIA N/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010 - 2014 (Rp. Miliar)
				2010	2014			
2.11	Pengembangan Iptek Olahraga	Meningkatnya penerapan iptek olahraga dalam upaya peningkatan prestasi	1. Jumlah riset penerapan teknologi olahraga modern pada metode pembinaan olahragawan, 2. Persentase pemanfaatan iptek olahraga modern pada metode pembinaan olahragawan andalan nasional.	7 75	47 ^{k)} 95	Pembinaan Olahraga Prestasi	Kemenpora	71,9
2.12	Pemberdayaan Organisasi Keolahragaan	Meningkatnya kapasitas pengelolaan organisasi keolahragaan	1. Jumlah pembina induk organisasi cabang olahraga yang dilatih manajemen, dan perencanaan program pelatihan, 2. Jumlah fasilitasi pembinaan induk organisasi cabang olahraga.	66 10	466 ^{k)} 10	Pembinaan Olahraga Prestasi	Kemenpora	59,0
2.13	Pengembangan dan Pembibitan Olahraga Prestasi	Meningkatnya pembibitan olahragawan dan pengembangan olahraga	1. Jumlah peserta pemanduan bakat cabang olahraga unggulan, 2. Jumlah fasilitasi keikutsertaan cabang olahraga unggulan pada kejuaraan bertaraf internasional, 3. Jumlah fasilitasi pemusatan latihan cabang olahraga unggulan, 4. Jumlah fasilitasi penyelenggaraan kejuaraan junior cabang olahraga unggulan bertaraf internasional.	400 12 11 1	400 60 ^{k)} 11 5 ^{k)}	Pembinaan Olahraga Prestasi	Kemenpora	104,7

BIDANG PEMBANGUNAN: SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA
PRIORITAS BIDANG: Peningkatan Partisipasi Pemuda, Budaya dan Prestasi Olahraga

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIA N/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010 - 2014 (Rp. Miliar)
				2010	2014			
2.14	Pengembangan Tenaga Keolahragaan	Meningkatnya kapasitas tenaga keolahragaan dan kualitas pembinaan	Jumlah tenaga keolahragaan pada cabang olahraga unggulan yang memperoleh fasilitasi peningkatan kompetensi	388	1.988 ^{k)}	Pembinaan Olahraga Prestasi	Kemenpora	71,5
TOTAL								4.195,6

KETERANGAN :

^{k)} Angka Kumulatif 5 tahun (2010-2014)

BIDANG PEMBANGUNAN : SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA
PRIORITAS BIDANG : Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010 - 2014 (Rp. Miliar)
				2010	2014			
1	Peningkatan Kualitas Pemahaman dan Pengamalan Agama	Meningkatnya kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama pada masyarakat	Penyuluh agama non-PNS (orang)	90.510	90.510			1.692,7
1.1	Pengelolaan dan Pembinaan Penerangan Agama Islam	Tersedianya tunjangan penyuluh non PNS agama Islam	Penyuluh agama Islam non PNS (Orang)	74.821	74.821	Program Bimbingan Masyarakat Islam	Kementerian Agama	1.045,8
1.2	Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Kristen	Tersedianya tunjangan penyuluh non PNS agama Kristen	Penyuluh agama Kristen non PNS (Orang)	6.697	6.697	Program Bimbingan Masyarakat Kristen	Kementerian Agama	248,8
1.3	Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Katolik	Tersedianya tunjangan penyuluh non PNS agama Katolik	Penyuluh agama Katolik non PNS (Orang)	4.406	4.406	Program Bimbingan Masyarakat Katolik	Kementerian Agama	182,9

BIDANG PEMBANGUNAN : SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA
PRIORITAS BIDANG : Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010 - 2014 (Rp. Miliar)
				2010	2014			
1.4	Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Hindu	Tersedianya tunjangan penyuluh non PNS agama Hindu	Penyuluh agama Hindu non PNS (Orang)	3.088	3.088	Program Bimbingan Masyarakat Hindu	Kementerian Agama	144,9
1.5	Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Budha	Tersedianya tunjangan penyuluh non PNS agama Budha	Penyuluh agama Budha non PNS (Orang)	1.498	1.498	Program Bimbingan Masyarakat Budha	Kementerian Agama	70,3
2	Peningkatan Kualitas Kerukunan Umat Beragama	Meningkatnya kerukunan umat beragama melalui pembentukan dan efektivitas FKUB	1. Operasional FKUB 2. Jumlah FKUB	183 15	473 30			445,6
2.1	Pembinaan Administrasi PKUB	Terlaksananya Pengelolaan dan Pembinaan Administrasi PKUB	Pelaksanaan Pengelolaan dan Pembinaan Administrasi PKUB (Paket)	1	5 ^{b)}	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya	Kementerian Agama	112,1

BIDANG PEMBANGUNAN : SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA
PRIORITAS BIDANG : Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010 - 2014 (Rp. Miliar)
				2010	2014			
2.2	Pembinaan Pendidikan Agama dan Keagamaan Konghucu dan Multikultural	Terlaksananya Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama dan Keagamaan	Kualitas Pendidikan Agama dan Keagamaan (Kegiatan)	2	10 ^{k)}	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya	Kementerian Agama	11,1
2.3	Pembinaan Kerukunan Umat Beragama	Tersedianya dana operasional FKUB Tk provinsi	Operasional FKUB Tkt provinsi	33	33	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya	Kementerian Agama	322,4
		Tersedianya dana operasional FKUB Tk Kabupaten	Operasional FKUB Tkt Kabupaten	150	440			
		Terlaksananya pembangunan Sekber Kerukunan Umat Beragama	Sekretariat Bersama Tingkat Kab/Kota	15	30			
		Terlaksananya pemulihan pasca konflik	Kegiatan pemulihan pasca konflik (kegiatan)	1	5 ^{k)}			

BIDANG PEMBANGUNAN : SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA
PRIORITAS BIDANG : Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010 - 2014 (Rp. Miliar)
				2010	2014			
3	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kehidupan Beragama	Meningkatnya kualitas pelayanan kehidupan beragama	1. Pelayanan nikah 2. Pengelolaan zakat 3. Pengelolaan wakaf	5.025 33 33	5.025 33 33			5.714,2
3.1	Pengelolaan Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syari'ah	Tersedianya dana operasional KUA Terehabilitasinya KUA Terlaksananya bantuan pemberdayaan lembaga sosial keagamaan	Terselenggaranya pelayanan nikah (unit) Kualitas gedung KUA (unit) Lembaga Sosial Keagamaan (Paket)	5.025 500 3	5.025 3.300 ^{b)} 38 ^{b)}	Program Bimbingan Masyarakat Islam	Kementerian Agama	5.169,4
3.2	Pengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan Zakat	Terlaksananya pengelolaan zakat dan pembinaan pemberdayaan lembaga zakat	Pengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan Zakat (provinsi)	33	33	Program Bimbingan Masyarakat Islam	Kementerian Agama	279,7

BIDANG PEMBANGUNAN : SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA
PRIORITAS BIDANG : Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010 - 2014 (Rp. Miliar)
				2010	2014			
3.3	Pengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan Wakaf	Terlaksananya pengelolaan wakaf dan pembinaan pemberdayaan lembaga-lembaga wakaf	Pengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan Wakaf (provinsi)	33	33	Program Bimbingan Masyarakat Islam	Kementerian Agama	197,1
3.4	Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Kristen	Terlaksananya bantuan pemberdayaan lembaga sosial keagamaan	Lembaga Sosial Keagamaan (Paket)	1	15 ^{k)}	Program Bimbingan Masyarakat Kristen	Kementerian Agama	25,0
3.5	Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Katolik	Terlaksananya bantuan pemberdayaan lembaga sosial keagamaan	Lembaga Sosial Keagamaan (Paket)	1	10 ^{k)}	Program Bimbingan Masyarakat Katolik	Kementerian Agama	18,0
3.6	Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Hindu	Terlaksananya bantuan pemberdayaan lembaga sosial keagamaan	Lembaga Sosial Keagamaan (Paket)	1	10 ^{k)}	Program Bimbingan Masyarakat Hindu	Kementerian Agama	13,0

BIDANG PEMBANGUNAN : SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA
PRIORITAS BIDANG : Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010 - 2014 (Rp. Miliar)
				2010	2014			
3.7	Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Budha	Terlaksananya bantuan pemberdayaan lembaga sosial keagamaan	Lembaga Sosial Keagamaan (Paket)	1	9 ^{k)}	Program Bimbingan Masyarakat Budha	Kementerian Agama	12,0
4	Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Ibadah Haji	Terlaksananya Penyelenggaraan Haji dan Umrah yang tertib dan lancar	Pelaksanaan Ibadah Haji serta Pengawasan Haji yang Tertib dan Lancar (Jamaah)	210.000	1.050.000 ^{k)}			2.061,0
4.1	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Setditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah	Terlaksananya Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Setditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah	Pelaksanaan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Setditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (kegiatan)	3	15 ^{k)}	Program Penyelenggaraan, Pembinaan, dan pengelolaan Haji dan Umrah	Kementerian Agama	98,1
4.2	Pelayanan Haji dan Umrah	Terlaksananya Pelayanan Ibadah Haji dan Umrah	Pelaksanaan Ibadah Haji serta Pengawasan Haji yang Tertib dan Lancar (jamaah)	210.000	1.050.000 ^{k)}	Program Penyelenggaraan, Pembinaan, dan pengelolaan Haji dan Umrah	Kementerian Agama	775,4

BIDANG PEMBANGUNAN : SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA
PRIORITAS BIDANG : Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010 - 2014 (Rp. Miliar)
				2010	2014			
4.3	Pengelolaan biaya penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah	Terlaksananya Pengelolaan biaya penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah	Pelaksanaan Pengelolaan biaya penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (kegiatan)	34	34	Program Penyelenggaraan, Pembinaan, dan pengelolaan Haji dan Umrah	Kementerian Agama	73,5
4.4	Pembinaan Ibadah Haji dan Umrah	Terlaksananya Pembinaan Ibadah Haji dan Umrah	Pelaksanaan Pembinaan Ibadah Haji dan Umrah (provinsi)	33	33	Program Penyelenggaraan, Pembinaan, dan pengelolaan Haji dan Umrah	Kementerian Agama	170,5
4.5	Pelayanan Kesehatan Ibadah Haji	Meningkatnya pelayanan kesehatan jamaah haji	Pelayanan kesehatan kepada jamaah haji (Orang)	210.000	1.050.000 ^{k)}	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya di Kemenkes	Kementerian Kesehatan	943,5
TOTAL								9.913,5

KETERANGAN :

^{k)} Angka Kumulatif 5 tahun (2010-2014)

BIDANG PEMBANGUNAN : SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA

PRIORITAS BIDANG : Penguatan Jati Diri Bangsa dan Pelestarian Budaya

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIA N/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010 - 2014 (Rp. Miliar)
				2010	2014			
1	Penguatan jati diri dan karakter bangsa yang berbasis pada keragaman budaya	Meningkatnya kesadaran dan pemahaman tentang pentingnya karakter dan pekerti bangsa	1. Persentase persepsi tentang silaturahmi	>80%	>85%			553,2
			2. Persentase persepsi tentang gotong royong	>80%	>85%			
			3. Persentase persepsi tentang tolong -menolong	>85%	>90%			
1.1	Pelestarian dan Pengembangan Nilai-Nilai Tradisi	Meningkatnya inventarisasi, revitalisasi, dan reaktualisasi nilai-nilai tradisi	1. Jumlah naskah inventarisasi nilai tradisi	50	50	Pengembangan Nilai Budaya, Seni, dan Perfilman	Kemenbudpar	31,5
			2. Jumlah karya budaya bernilai tradisi hasil reaktualisasi	5	25 ^{K)}			
1.2	Pembangunan Karakter dan Pekerti Bangsa	Meningkatnya internalisasi nilai-nilai budaya yang mendukung pembangunan karakter dan pekerti bangsa	1. Jumlah peserta internalisasi dan sosialisasi karakter dan pekerti bangsa	600	3.900 ^{K)}	Pengembangan Nilai Budaya, Seni, dan Perfilman	Kemenbudpar	50,0
			2. Jumlah pelaku budaya penerima penghargaan	50	300 ^{K)}			

BIDANG PEMBANGUNAN : SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA

PRIORITAS BIDANG : Penguatan Jati Diri Bangsa dan Pelestarian Budaya

NO	FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIA N/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010 - 2014 (Rp. Miliar)
				2010	2014			
1.3	Pengembangan Masyarakat Adat	Meningkatnya pemberdayaan komunitas adat	1. Jumlah fasilitasi dan advokasi komunitas adat	32	32	Pengembangan Nilai Budaya, Seni, dan Perfilman	Kemenbudpar	26,0
			2. Jumlah naskah inventarisasi komunitas adat	10	10			
1.4	Peningkatan Sensor Film	Meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan lembaga sensor film	Jumlah film/video/iklan lulus sensor	40.000	221.000 ^{K)}	Pengembangan Nilai Budaya, Seni, dan Perfilman	Kemenbudpar	133,7
1.5	Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional	Meningkatnya pemanfaatan hasil hasil kajian sejarah dan nilai tradisional	Jumlah naskah kajian pelestarian sejarah dan nilai tradisional	110	1.157 ^{K)}	Pengembangan Nilai Budaya, Seni, dan Perfilman	Kemenbudpar	256,0

BIDANG PEMBANGUNAN : SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA

PRIORITAS BIDANG : Penguatan Jati Diri Bangsa dan Pelestarian Budaya

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIA N/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010 - 2014 (Rp. Miliar)
				2010	2014			
1.6	Pengembangan Nilai Sejarah	Meningkatnya internalisasi nilai-nilai sejarah	1. Jumlah naskah sejarah	3	15 ^{K)}	Kesejarahan, Kepurbakalaan, dan Permuseuman	Kemenbudpar	28,0
			2. Jumlah peserta internalisasi dan sosialisasi nilai-nilai sejarah	5.200	33.300 ^{K)}			
1.7	Pengembangan Geografi Sejarah	Meningkatnya pemahaman dan apresiasi masyarakat terhadap sejarah kewilayahan Indonesia	1. Jumlah naskah sejarah kewilayahan Indonesia	5	29 ^{K)}	Kesejarahan, Kepurbakalaan, dan Permuseuman	Kemenbudpar	28,0
			2. Jumlah peta/atlas geografi sejarah	1	11 ^{K)}			
			3. Jumlah peserta internalisasi dan sosialisasi sejarah kewilayahan Indonesia	400	4.200 ^{K)}			

BIDANG PEMBANGUNAN : SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA

PRIORITAS BIDANG : Penguatan Jati Diri Bangsa dan Pelestarian Budaya

NO	FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIA N/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010 - 2014 (Rp. Miliar)
				2010	2014			
2	Peningkatan apresiasi terhadap keragaman serta kreativitas seni dan budaya	Meningkatnya apresiasi masyarakat terhadap keragaman seni dan budaya, serta kreativitas seni, budaya dan perfilman	1. Jumlah karya seni budaya yang memperoleh perlindungan hak kekayaan intelektual	400	2.000 ^{K)}			864,9
			2. Jumlah fasilitasi pertunjukan, pameran, festival karya seni budaya dan film.	83	415 ^{K)}			
			3. Jumlah fasilitasi sarana pengembangan, pendalaman, dan pertunjukan seni budaya	25	529 ^{K)}			
			4. Jumlah reaktualisasi, inventarisasi, dan dokumentasi karya budaya	220	1.100 ^{K)}			
			5. Jumlah produksi film nasional yang berkualitas	75	391 ^{K)}			

BIDANG PEMBANGUNAN : SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA

PRIORITAS BIDANG : Penguatan Jati Diri Bangsa dan Pelestarian Budaya

NO	FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIA N/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010 - 2014 (Rp. Miliar)
				2010	2014			
2.1	Pelestarian dan Pengembangan Kesenian	Meningkatnya apresiasi, kreativitas, dan produktivitas para pelaku seni	1. Jumlah fasilitasi pertunjukan, pameran, festival, lomba, dan pawai	20	100 ^{K)}	Pengembangan Nilai Budaya, Seni, dan Perfilman	Kemenbudpar	174,2
			2. Jumlah reaktualisasi kesenian yang hampir punah	2	10 ^{K)}			
			3. Jumlah naskah inventarisasi karya seni budaya	25	125 ^{K)}			
			4. Jumlah fasilitasi sarana bagi pengembangan, pendalaman dan pegelaran seni budaya	-	504 ^{K)}			
2.2	Pengembangan Perfilman Nasional	Meningkatnya kualitas dan kuantitas produksi film nasional	1. Jumlah Fasilitasi Festival Film dalam dan luar negeri	11	11	Pengembangan Nilai Budaya, Seni, dan Perfilman	Kemenbudpar	201,0
			2. Jumlah fasilitasi organisasi dan komunitas perfilmar	18	18			
2.3	Pengembangan Galeri Nasional	Meningkatnya kualitas pengelolaan Galeri Nasional	1. Jumlah karya seni yang dipamerkan	1.750	2.000	Pengembangan Nilai Budaya, Seni, dan Perfilman	Kemenbudpar	39,2
			2. Jumlah karya seni yang diakuisisi	4	4			
			3. Jumlah karya seni rupa yang dipreservasi (konservasi dan restorasi)	75	415 ^{K)}			

BIDANG PEMBANGUNAN : SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA

PRIORITAS BIDANG : Penguatan Jati Diri Bangsa dan Pelestarian Budaya

NO	FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIA N/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010 - 2014 (Rp. Miliar)
				2010	2014			
			4. Jumlah fasilitasi prasarana pengembangan pusat kebudayaan nasional	-	1			
2.4	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Nilai Budaya, Seni dan Film	Meningkatnya manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya dalam rangka pengembangan nilai budaya, seni dan perfilman	Jumlah fasilitasi sarana pengembangan, pendalaman, dan pergelaran seni budaya	25	25 ^{K)}	Pengembangan Nilai Budaya, Seni, dan Perfilman	Kemenbudpar	450,5
3	Peningkatan kualitas perlindungan, penyelamatan, pengembangan dan pemanfaatan warisan budaya	1. Meningkatnya internalisasi nilai kesejarahan dan wawasan kebangsaan yang mendukung pembangunan karakter dan jati diri bangsa 2. Meningkatnya kualitas pengelolaan, perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan warisan budaya, khususnya Benda Cagar Budaya/Situs /Kawasan Cagar Budaya 3. Meningkatnya kualitas pelayanan dan pengelolaan museum, termasuk naskah-naskah kuno	1. Jumlah peserta internalisasi dan sosialisasi nilai-nilai sejarah dan sejarah kewilayahan Indonesia	5.600	37.500			2.035,4
			2. Jumlah warisan budaya dunia dan cagar budaya nasional yang ditetapkan dan dikelola secara terpadu	1	9 ^{K)}			
			3. Jumlah benda cagar budaya yang dilindungi dan dipelihara	2.100	7.700			

BIDANG PEMBANGUNAN : SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA

PRIORITAS BIDANG : Penguatan Jati Diri Bangsa dan Pelestarian Budaya

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIA N/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010 - 2014 (Rp. Miliar)
				2010	2014			
			4. Jumlah situs dan kawasan cagar budaya yang dilindungi, dipelihara, dan dieksplorasi	2.226	2.490			
			5. Jumlah museum yang memenuhi standar pelayanan dan pengelolaan	4	79 ^{K)}			
			6. Jumlah koleksi naskah kuno yang diselamatkan dan dikelola	3.120	4.000			

BIDANG PEMBANGUNAN : SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA

PRIORITAS BIDANG : Penguatan Jati Diri Bangsa dan Pelestarian Budaya

NO	FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010 - 2014 (Rp. Miliar)
				2010	2014			
3.1	Pengembangan Pengelolaan Peninggalan Bawah Air	Meningkatnya kualitas perlindungan, pemeliharaan, pengembangan, dan pemanfaatan peninggalan bawah air	1. Jumlah situs bawah air (diidentifikasi, diinventarisasi, dipetakan, ditetapkan, dan dieksplorasi)	8	73	Kesejarahan, Kepurbakalaan, dan Permuseuman	Kemenbudpar	34,7
			2. Jumlah BCB bawah air (diselamatkan, diamankan, dirawat, diawetkan, dan dimanfaatkan)	1.000	6.000			
3.2	Pengembangan Pengelolaan Peninggalan Kepurbakalaan	Meningkatnya kualitas perlindungan, pemeliharaan, pengembangan, dan pemanfaatan BCB/Situs dan Kawasan kepurbakalaan secara terpadu	1. Penetapan dan pembentukan pengelolaan terpadu cagar budaya	1	9	Kesejarahan, Kepurbakalaan, dan Permuseuman	Kemenbudpar	67,9
			2. Jumlah BCB/situs/kawasan yang diinventarisasi dan ditetapkan secara nasional	1.100	1.700			
			3. Jumlah cagar budaya nasional yang dinominasikan dan didaftarkan sebagai	4	4			

BIDANG PEMBANGUNAN : SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA

PRIORITAS BIDANG : Penguatan Jati Diri Bangsa dan Pelestarian Budaya

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIA N/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010 - 2014 (Rp. Miliar)
				2010	2014			
3.3	Pengembangan Pengelolaan Permuseuman	Meningkatnya kualitas pengelolaan dan pelayanan museum, termasuk museum daerah	1. Jumlah koleksi dan naskah yang dikelola	620	1.500	Kesejarahan, Kepurbakalaan, dan Permuseuman	Kemenbudpar	395,8
			2. Jumlah museum yang direvitalisasi	4	84 ^{K)}			
			3. Jumlah Museum Berskala Nasional yang dikembangkan	1	2			
			4. Jumlah pengunjung museum	56.500	371.000 ^{K)}			
3.4	Pengembangan Pengelolaan Museum Nasional	Meningkatnya kualitas pengelolaan dan pelayanan museum nasional	1. Jumlah koleksi dan naskah yang dikelola	2.500	2.500	Kesejarahan, Kepurbakalaan, dan Permuseuman	Kemenbudpar	230,6
			2. Jumlah penerbitan publikasi museum (eksemplar)	5.500	49.500 ^{K)}			
			3. Jumlah pengunjung museum nasional	200.000	1.500.000 ^{K)}			
			4. Luas pengembangan dan penataan gedung C, tempat penyimpanan (<i>storage</i>) dan ruang presentasi (m2)	1.142	89.538 ^{K)}			

BIDANG PEMBANGUNAN : SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA

PRIORITAS BIDANG : Penguatan Jati Diri Bangsa dan Pelestarian Budaya

NO	FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIA N/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010 - 2014 (Rp. Miliar)
				2010	2014			
3.5	Pelestarian Peninggalan Sejarah dan Purbakala	Meningkatnya kualitas perlindungan, pemeliharaan, pengembangan, dan pemanfaatan BCB/Situs dan Kawasan kepurbakalaan	1. Jumlah Cagar Budaya/Situs/kawasan yang dilestarikan	2.218	2.470	Kesejarahan, Kepurbakalaan, dan Permuseuman	Kemenbudpar	1.036,8
			2. Inventarisasi dan pendaftaran peninggalan purbakala	2.600	2.600			
			3. Jumlah kajian pelestarian peninggalan purbakala	56	346 ^{K)}			
3.6	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Sejarah dan Purbakala	Terselenggaranya kegiatan koordinasi perencanaan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan, penyusunan kebijakan, peningkatan kualitas SDM aparatur, dan pendukung teknis bidang Kesejarahan, Kepurbakalaan, dan Permuseuman	Jumlah fasilitasi sarana perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan kepurbakalaan dan permuseuman	33	168 ^{K)}	Kesejarahan, Kepurbakalaan, dan Permuseuman	Kemenbudpar	269,6

BIDANG PEMBANGUNAN : SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA

PRIORITAS BIDANG : Penguatan Jati Diri Bangsa dan Pelestarian Budaya

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIA N/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010 - 2014 (Rp. Miliar)
				2010	2014			
4	Pengembangan Sumber Daya Kebudayaan	Meningkatnya kapasitas sumber daya pembangunan kebudayaan	1. Jumlah peserta pembekalan dan pelatihan	1.150	5.865 ^{K)}			228,6
			2. Jumlah penelitian dan pengembangan	157	800 ^{K)}			
4.1	Penelitian dan Pengembangan Bidang Arkeologi	Meningkatnya penelitian dan pengembangan bidang arkeologi	Jumlah penelitian dan pengembangan bidang arkeologi	144	735 ^{K)}	Pengembangan Sumber Daya Kebudayaan dan Pariwisata	Kemenbudpar	192,6
4.2	Penelitian dan Pengembangan Bidang Kebudayaan	Meningkatnya litbang kebudayaan dalam mendukung kebijakan pembangunan kebudayaan	Jumlah penelitian dan pengembangan bidang kebudayaan	13	65 ^{K)}	Pengembangan Sumber Daya Kebudayaan dan Pariwisata	Kemenbudpar	36,0
TOTAL								3.682,0

KETERANGAN :

^{K)} Angka Kumulatif 5 tahun (2010-2014)

BIDANG PEMBANGUNAN : SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA

PRIORITAS BIDANG : Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan Kesejahteraan Sosial

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010 - 2014 (Rp. Miliar)
				2010	2014			
1.	Peningkatan Program Keluarga Harapan	Terlaksananya pemberian Bantuan Tunai Bersyarat bagi RTSM (PKH)	Jumlah RTSM yang mendapatkan Bantuan Tunai Bersyarat PKH (RTSM)	816.000	1.170.000	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Kementerian Sosial	8.985,0
1.1	Bantuan Tunai Bersyarat	Terlaksananya pemberian Bantuan Tunai Bersyarat bagi RTSM (PKH)	Jumlah RTSM yang mendapatkan Bantuan Tunai Bersyarat PKH (RTSM)	816.000	1.170.000	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Kementerian Sosial	8.985,0
2.	Peningkatan pelayanan dan rehabilitasi sosial untuk anak telantar, lanjut usia telantar dan penyandang cacat telantar dan/atau berat	Terlaksananya pelayanan, perlindungan, dan rehabilitasi sosial bagi anak dan balita telantar, anak jalanan, anak cacat, anak berhadapan dengan hukum, anak yang membutuhkan perlindungan khusus, dan lanjut usia telantar, serta penyandang cacat	Jumlah anak dan balita telantar, anak jalanan, anak cacat, anak berhadapan dengan hukum, dan anak yang membutuhkan perlindungan khusus, yang dilayani, dilindungi, dan direhabilitasi (jiwa)	159.500	263.000	Program Rehabilitasi Sosial	Kementerian Sosial	3.645,9
			Jumlah lanjut usia telantar yang dilayani, dilindungi, dan direhabilitasi (jiwa)	22.040	51.420			

BIDANG PEMBANGUNAN : SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA

PRIORITAS BIDANG : Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan Kesejahteraan Sosial

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010 - 2014 (Rp. Miliar)
				2010	2014			
			Jumlah penyandang cacat yang berhasil dilayani, dilindungi dan direhabilitasi (jiwa)	34.900	75.640			
2.1	Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial Anak	Terlaksananya pelayanan, perlindungan dan rehabilitasi sosial bagi anak dan balita telantar, anak jalanan, anak cacat, anak berhadapan dengan hukum, dan anak yang membutuhkan perlindungan khusus	Jumlah anak dan balita telantar, anak jalanan, anak cacat dan anak berhadapan dengan hukum, dan anak yang membutuhkan perlindungan khusus yang berhasil dilayani, dilindungi dan direhabilitasi baik di dalam maupun di luar panti (jiwa)	159.500	263.000	Program Rehabilitasi Sosial	Kementerian Sosial	1.717,1
2.2	Pelayanan Sosial Lanjut Usia	Terlaksananya pelayanan, perlindungan dan rehabilitasi sosial bagi lanjut usia telantar	Jumlah lanjut usia telantar yang berhasil dilayani, dilindungi dan direhabilitasi baik di dalam maupun di luar panti (jiwa)	22.040	51.420	Program Rehabilitasi Sosial	Kementerian Sosial	635,1
2.3	Rehabilitasi dan Perlindungan Penyandang Cacat	Terlaksananya pelayanan, perlindungan dan rehabilitasi sosial bagi penyandang cacat	Jumlah penyandang cacat yang berhasil dilayani, dilindungi dan direhabilitasi baik di dalam maupun di luar panti (jiwa)	34.900	75.640	Program Rehabilitasi Sosial	Kementerian Sosial	1.293,7
3.	Peningkatan bantuan sosial bagi korban bencana alam dan bencana sosial	Terpenuhinya kebutuhan darurat dan pelayanan sosial bagi korban bencana alam dan sosial	Jumlah korban bencana alam yang dibantu dan dilayani (jiwa)	40.000	247.900 ^{K)}	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Kementerian Sosial	3.285,3
			Jumlah korban bencana sosial yang dibantu dan dilayani (jiwa)	43.000	266.900 ^{K)}			

BIDANG PEMBANGUNAN : SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA

PRIORITAS BIDANG : Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan Kesejahteraan Sosial

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010 - 2014 (Rp. Miliar)
				2010	2014			
3.1	Bantuan Sosial Korban Bencana Alam	Terpenuhinya kebutuhan darurat dan pelayanan sosial bagi korban bencana alam	Jumlah korban bencana alam yang berhasil dibantu dan dilayani (jiwa)	40.000	247.900 ^{K)}	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Kementerian Sosial	2.340,2
3.2	Bantuan Sosial Korban Bencana Sosial	Terpenuhinya kebutuhan darurat dan pelayanan sosial bagi korban bencana sosial	Jumlah korban bencana sosial yang berhasil dibantu dan dilayani (jiwa)	43.000	266.900 ^{K)}	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Kementerian Sosial	945,1
4.	Peningkatan pemberdayaan sosial bagi fakir miskin dan komunitas adat terpencil (KAT)	Tersalurkannya bantuan pemberdayaan sosial bagi fakir miskin, dan kebutuhan dasar, aksesibilitas, dan pelayanan sosial dasar bagi KAT	Jumlah fakir miskin yang mendapatkan bantuan dan akses kesempatan kerja dan berusaha, pelayanan kesehatan dasar, dan pendidikan dasar melalui KUBE (kelompok)	12.793	80.028 ^{K)}	Program Pemberdayaan Sosial	Kementerian Sosial	3.439,4
			Tersedianya akses perumahan dan permukiman melalui Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (unit)	6.150	38.420 ^{K)}			
			Jumlah permukiman serta infrastruktur yang tersedia bagi KAT (Unit)	2.300	3.720			
			Jumlah KAT yang mendapat jaminan hidup (KK)	4.270	7.010			

BIDANG PEMBANGUNAN : SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA

PRIORITAS BIDANG : Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan Kesejahteraan Sosial

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010 - 2014 (Rp. Miliar)
				2010	2014			
4.1	Penanggulangan Kemiskinan	Terselurkannya bantuan pemberdayaan masyarakat bagi fakir miskin dalam bentuk KUBE dan stimulan UEP	Tersedianya akses kesempatan kerja dan berusaha, pelayanan kesehatan dasar dan pendidikan dasar melalui KUBE (kelompok)	12.793	80.028 ^{K)}	Program Pemberdayaan Sosial	Kementerian Sosial	2.701,2
			Tersedianya akses perumahan dan permukiman melalui Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (unit)	6.150	38.420 ^{K)}			
4.2	Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT)	Terpenuhinya kebutuhan dasar, aksesibilitas dan pelayanan sosial dasar bagi warga KAT	Tersedianya permukiman dan infrastruktur (unit)	2.300	3.720	Program Pemberdayaan Sosial	Kementerian Sosial	738,2
			Pemberian jaminan hidup (KK)	4.270	7.010			
TOTAL								19.355,6

KETERANGAN :

^{K)} Angka Kumulatif 5 tahun (2010-2014)

BIDANG PEMBANGUNAN : SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA

PRIORITAS BIDANG : Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010 - 2014 (Rp. Milyar)	
				2010	2014				
	1. Peningkatan kapasitas kelembagaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan	Meningkatnya keefektifan kelembagaan PUG melalui perencanaan dan penganggaran yang responsif gender serta pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi di tingkat nasional dan daerah	Jumlah program dan kegiatan pembangunan yang responsif gender	41	75 ^{K)}			397,7	
1.1	Penyusunan dan harmonisasi kebijakan bidang pendidikan yang responsif gender	Meningkatnya jumlah kebijakan pelaksanaan PUG bidang pendidikan	1. Jumlah kebijakan pelaksanaan PUG dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan	2	3 ^{K)}	Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Kementerian PP dan PA	11,1	
			2. Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi dalam penerapan ARG di bidang pendidikan	K/L	1				5 ^{K)}
				prov	5				19 ^{K)}
			3. Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi dalam penyusunan data terpilah di bidang pendidikan	K/L	-				1
				prov	-	8 ^{K)}			

BIDANG PEMBANGUNAN : SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA

PRIORITAS BIDANG : Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010 - 2014 (Rp. Milyar)	
				2010	2014				
1.2	Penyusunan dan harmonisasi kebijakan bidang kesehatan yang responsif gender	Meningkatnya jumlah kebijakan pelaksanaan PUG bidang kesehatan	1. Jumlah kebijakan pelaksanaan PUG di bidang kesehatan		3	4 ^{K)}	Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Kementerian PP dan PA	12,5
			2. Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi dalam penerapan ARG di bidang kesehatan	K/L	1	5 ^{K)}			
				prov	5	25 ^{K)}			
			3. Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi dalam penyusunan data terpilah di bidang kesehatan	K/L	-	1			
prov	1	25 ^{K)}							
1.3	Penyusunan dan harmonisasi kebijakan bidang sumber daya alam dan lingkungan yang responsif gender	Meningkatnya jumlah kebijakan pelaksanaan PUG bidang sumber daya alam dan lingkungan	1. Jumlah kebijakan pelaksanaan PUG di bidang sumber daya alam dan lingkungan		3	3 ^{K)}	Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Kementerian PP dan PA	12,5
			2. Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi dalam penerapan ARG di bidang sumber daya alam dan lingkungan	K/L	2	10 ^{K)}			
				prov	5	28 ^{K)}			
			3. Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi dalam penyusunan data terpilah di bidang sumber daya alam dan lingkungan	K/L	-	5			
prov	-	14 ^{K)}							

BIDANG PEMBANGUNAN : SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA

PRIORITAS BIDANG : Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR		TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010 - 2014 (Rp. Milyar)
					2010	2014			
1.4	Penyusunan dan harmonisasi kebijakan partisipasi perempuan di bidang politik dan pengambilan keputusan	Meningkatnya jumlah kebijakan partisipasi perempuan di bidang politik dan pengambilan keputusan	1. Jumlah kebijakan pelaksanaan PUG di bidang politik dan pengambilan keputusan		2	5 ^{K)}	Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Kementerian PP dan PA	18,5
			2. Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi dalam penerapan ARG di bidang politik dan pengambilan keputusan	K/L	3	3			
				prov	7	33 ^{K)}			
			3. Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi dalam penyusunan data terpilah di bidang politik dan pengambilan keputusan	K/L	-	3			
prov	-	12 ^{K)}							

BIDANG PEMBANGUNAN : SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA

PRIORITAS BIDANG : Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR		TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010 - 2014 (Rp. Milyar)
					2010	2014			
1.5	Penyusunan dan harmonisasi kebijakan bidang hukum yang responsif gender	Meningkatnya jumlah kebijakan pelaksanaan PUG di bidang hukum	1. Jumlah kebijakan pelaksanaan PUG di bidang hukum		3	3 ^{K)}	Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Kementerian PP dan PA	36,4
			2. Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi dalam penerapan ARG di bidang hukum	K/L	1	5 ^{K)}			
				prov	8	8			
			3. Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi dalam penyusunan data terpilah di bidang hukum	K/L	2	2			
				prov	7	33 ^{K)}			
			1.6	Penyusunan dan harmonisasi kebijakan bidang ketenagakerjaan yang responsif gender	Meningkatnya jumlah kebijakan pelaksanaan PUG bidang ketenagakerjaan	1. Jumlah kebijakan pelaksanaan PUG di bidang ketenagakerjaan			
2. Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi dalam penerapan ARG di bidang ketenagakerjaan	K/L	1				1			
	prov	5				25 ^{K)}			
3. Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi dalam penyusunan data terpilah di bidang ketenagakerjaan	K/L	-				1			
	prov	2				23 ^{K)}			

BIDANG PEMBANGUNAN : SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA

PRIORITAS BIDANG : Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010 - 2014 (Rp. Milyar)	
				2010	2014				
1.7	Penyusunan dan harmonisasi kebijakan koperasi, usaha mikro dan kecil, industri, dan perdagangan yang responsif gender	Meningkatnya jumlah kebijakan pelaksanaan PUG bidang koperasi, usaha mikro dan kecil, industri, dan perdagangan	1. Jumlah kebijakan pelaksanaan PUG di bidang koperasi, usaha mikro dan kecil, industri, dan perdagangan		4	4 ^{K)}	Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Kementerian PP dan PA	19,9
			2. Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi dalam penerapan ARG di bidang koperasi, usaha mikro dan kecil, industri, dan perdagangan	K/L	3	4			
				prov	3	22 ^{K)}			
			3. Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi dalam penyusunan data terpilah di bidang koperasi, usaha mikro dan kecil, industri, dan perdagangan	K/L	2	2			
				prov	4	23 ^{K)}			

BIDANG PEMBANGUNAN : SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA

PRIORITAS BIDANG : Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010 - 2014 (Rp. Milyar)	
				2010	2014				
1.8	Penyusunan dan harmonisasi kebijakan bidang pertanian, kehutanan, perikanan, kelautan, ketahanan pangan, dan agrobisnis yang responsif gender	Meningkatnya jumlah kebijakan pelaksanaan PUG bidang pertanian, kehutanan, perikanan, kelautan, ketahanan pangan, dan agrobisnis	1. Jumlah kebijakan pelaksanaan PUG di bidang pertanian, kehutanan, perikanan, kelautan, ketahanan pangan, dan agrobisnis		4	10 ^{K)}	Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Kementerian PP dan PA	24,6
			2. Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi dalam penerapan ARG di bidang pertanian, kehutanan, perikanan, kelautan, ketahanan pangan, dan agrobisnis	K/L	3	3			
				prov	4	30 ^{K)}			
			3. Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi dalam penyusunan data terpilah di bidang pertanian, kehutanan, perikanan, kelautan, ketahanan pangan, dan agrobisnis	K/L	3	3			
				prov	4	27 ^{K)}			

BIDANG PEMBANGUNAN : SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA

PRIORITAS BIDANG : Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010 - 2014 (Rp. Milyar)	
				2010	2014				
1.9	Penyusunan dan harmonisasi kebijakan bidang IPTEK dan sumber daya ekonomi yang responsif gender	Meningkatnya jumlah kebijakan pelaksanaan PUG bidang IPTEK dan sumber daya ekonomi	1. Jumlah kebijakan pelaksanaan PUG di bidang IPTEK dan sumber daya ekonomi		2	3 ^{K)}	Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Kementerian PP dan PA	14,9
			2. Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi dalam penerapan ARG di bidang IPTEK dan sumber daya ekonomi	K/L	1	1			
				prov	5	25 ^{K)}			
			3. Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi dalam penyusunan data terpilah di bidang IPTEK dan sumber daya ekonomi	K/L	1	1			
prov	2	10 ^{K)}							
1.10	Penyusunan dan harmonisasi kebijakan bidang infrastruktur yang responsif gender	Meningkatnya jumlah kebijakan pelaksanaan PUG bidang infrastruktur	1. Jumlah kebijakan pelaksanaan PUG di bidang infrastruktur		4	11 ^{K)}	Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Kementerian PP dan PA	16,8
			2. Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi dalam penerapan ARG di bidang infrastruktur	K/L	-	4			
				prov	-	18 ^{K)}			
			3. Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi dalam penyusunan data terpilah di bidang infrastruktur	K/L	-	1			
prov	-	13 ^{K)}							

BIDANG PEMBANGUNAN : SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA

PRIORITAS BIDANG : Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010 - 2014 (Rp. Milyar)	
				2010	2014				
1.11	Penyusunan dan harmonisasi kebijakan perlindungan perempuan dari tindak kekerasan	Meningkatnya jumlah kebijakan perlindungan perempuan dari tindak kekerasan	1. Jumlah kebijakan perlindungan perempuan dari tindak kekerasan		5	9 ^{K)}	Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Kementerian PP dan PA	50,1
			2. Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi dalam penerapan kebijakan perlindungan perempuan dari tindak kekerasan	K/L	3	3			
				prov	6	33			
3. Jumlah kompilasi data perlindungan perempuan dari tindak kekerasan	prov	3	23 ^{K)}						
1.12	Penyusunan dan harmonisasi kebijakan penyusunan data gender	Meningkatnya jumlah kebijakan penerapan sistem data gender	1. Jumlah kebijakan penerapan sistem data gender		2	4 ^{K)}	Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Kementerian PP dan PA	62,4
			2. Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi dalam kebijakan penerapan sistem data terpilah gender	K/L	1	17 ^{K)}			
				prov	0	33 ^{K)}			
3. Tersedianya sistem data gender		1	2 ^{K)}						

BIDANG PEMBANGUNAN : SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA

PRIORITAS BIDANG : Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010 - 2014 (Rp. Milyar)	
				2010	2014				
1.13	Penyusunan dan harmonisasi kebijakan perlindungan masalah sosial perempuan	Meningkatnya jumlah kebijakan perlindungan masalah sosial perempuan	1. Jumlah kebijakan perlindungan masalah sosial perempuan		3	6 ^{K)}	Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Kementerian PP dan PA	11,1
			2. Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi dalam penerapan kebijakan perlindungan masalah sosial perempuan	K/L	1	5 ^{K)}			
				prov	5	24 ^{K)}			
			3. Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi dalam penyusunan data perlindungan masalah sosial perempuan	K/L	1	1			
prov	1	6 ^{K)}							
1.14	Penyusunan dan harmonisasi kebijakan perlindungan tenaga kerja	Meningkatnya jumlah kebijakan perlindungan tenaga kerja	1. Jumlah kebijakan perlindungan tenaga kerja perempuan		1	4 ^{K)}	Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Kementerian PP dan PA	13,0
			2. Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi dalam penerapan kebijakan perlindungan tenaga kerja	K/L	1	1			
				prov	5	23 ^{K)}			
			3. Jumlah kompilasi data perlindungan tenaga kerja perempuan	K/L	1	1			
prov	2	7 ^{K)}							

BIDANG PEMBANGUNAN : SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA

PRIORITAS BIDANG : Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010 - 2014 (Rp. Milyar)	
				2010	2014				
1.15	Penyusunan dan harmonisasi kebijakan perlindungan korban perdagangan orang	Meningkatnya jumlah kebijakan perlindungan korban tindak pidana perdagangan orang	1. Jumlah kebijakan perlindungan korban tindak pidana perdagangan orang	2	3 ^{K)}	Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Kementerian PP dan PA	33,8	
			2. Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi dalam penerapan kebijakan perlindungan korban tindak pidana perdagangan orang	K/L	1				10
				prov	5				15
			3. Jumlah kompilasi data perlindungan korban tindak pidana perdagangan orang	K/L	-				3 ^{K)}
prov	-	6 ^{K)}							
1.16	Koordinasi penyusunan perencanaan program dan anggaran, dan kerjasama luar negeri	Meningkatnya rencana program dan anggaran serta evaluasi kinerja organisasi yang diselesaikan, dilaksanakan, dipantau dan dievaluasi tepat waktu, terintegrasi dan harmonis dengan dokumen perencanaan lainnya (RPJPN, RPJMN, Renstra)	1. % rencana program dan anggaran yang diselesaikan tepat waktu berdasarkan data terkini, terintegrasi dan harmonis dengan dokumen perencanaan lainnya (RPJPN, RPJMN, Renstra)	100	100	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Kementerian PP dan PA	45,4	
			2. % kegiatan tindak lanjut dari kerjasama Bilateral dan Multilateral	100	100				

BIDANG PEMBANGUNAN : SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA

PRIORITAS BIDANG : Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010 - 2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
2.	Peningkatan kelembagaan perlindungan anak	1. Meningkatnya penguatan dasar hukum dan kebijakan yang mendukung pemenuhan hak-hak anak 2. Menguatnya manajemen dan sistem kelembagaan perlindungan anak	Persentase jumlah kebijakan dan peraturan perundang-undangan terkait perlindungan anak yang diharmonisasikan	100	100			255,5
2.1	Penyusunan dan harmonisasi kebijakan pemenuhan hak pendidikan anak	Meningkatnya jumlah kebijakan pemenuhan hak pendidikan anak	1. Jumlah kebijakan pemenuhan hak pendidikan anak 2. Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi dalam pemenuhan hak pendidikan anak 3. Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi dalam penyusunan data pelaksanaan kebijakan pendidikan anak	1 K/L prov K/L prov	3 ^{KJ} 1 1 1 33 ^{KJ}	Program Perlindungan Anak	Kementerian PP dan PA	27,5

BIDANG PEMBANGUNAN : SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA

PRIORITAS BIDANG : Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010 - 2014 (Rp. Milyar)	
				2010	2014				
2.2	Penyusunan dan harmonisasi kebijakan pemenuhan hak kesehatan anak	Meningkatnya jumlah kebijakan pemenuhan hak kesehatan anak	1. Jumlah kebijakan pemenuhan hak kesehatan anak		2	2	Program Perlindungan Anak	Kementerian PP dan PA	19,1
			2. Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi dalam pemenuhan hak kesehatan anak	K/L	1	2			
				prov	4	23 ^{K)}			
			3. Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi dalam penyusunan data kesehatan anak	K/L	1	1			
				prov	4	19 ^{K)}			
			2.3	Penyusunan dan harmonisasi kebijakan pemenuhan hak partisipasi anak	Meningkatnya jumlah kebijakan pemenuhan hak partisipasi anak	1. Jumlah kebijakan pemenuhan hak partisipasi anak			
2. Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi dalam pemenuhan hak partisipasi anak	K/L	-				1			
	prov	2				25 ^{K)}			
3. Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi dalam penyusunan data pemenuhan hak partisipasi anak	K/L	-				3 ^{K)}			
	prov	1				17 ^{K)}			

BIDANG PEMBANGUNAN : SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA

PRIORITAS BIDANG : Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010 - 2014 (Rp. Milyar)	
				2010	2014				
2.4	Penyusunan dan harmonisasi kebijakan lingkungan yang layak untuk anak	Meningkatnya jumlah kebijakan lingkungan yang layak untuk anak	1. Jumlah kebijakan lingkungan yang layak untuk anak		2	2 ^{K)}	Program Perlindungan Anak	Kementerian PP dan PA	12,8
			2. Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi tentang lingkungan yang layak untuk anak	K/L	1	5 ^{K)}			
				prov	4	29 ^{K)}			
			3. Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi dalam penyusunan data lingkungan yang layak untuk anak	K/L	1	5 ^{K)}			
prov	1	12 ^{K)}							
2.5	Penyusunan dan harmonisasi kebijakan pengembangan kabupaten/kota layak anak (KLA)	Meningkatnya jumlah kebijakan pengembangan kabupaten/kota layak anak (KLA)	1. Jumlah kebijakan pengembangan kabupaten/kota layak anak (KLA)		2	2 ^{K)}	Program Perlindungan Anak	Kementerian PP dan PA	49,0
			2. Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi tentang kota layak	K/L	1	10			
				prov	10	10			

BIDANG PEMBANGUNAN : SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA

PRIORITAS BIDANG : Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR		TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010 - 2014 (Rp. Milyar)
					2010	2014			
			3. Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi dalam penyusunan data pengembangan kabupaten/kota layak anak (KLA)	K/L	1	2			
				prov	7	25 ^{K)}			
2.6	Penyusunan dan harmonisasi kebijakan penghapusan kekerasan pada anak	Meningkatnya jumlah kebijakan penghapusan kekerasan pada anak	1. Jumlah kebijakan penghapusan kekerasan pada anak		1	4 ^{K)}	Program Perlindungan Anak	Kementerian PP dan PA	11,8
			2. Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi tentang penghapusan kekerasan pada anak	K/L	1	6 ^{K)}			
				prov	5	26 ^{K)}			
			3. Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi dalam penyusunan data anak korban kekerasan	K/L	1	1			
				prov	2	13 ^{K)}			

BIDANG PEMBANGUNAN : SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA

PRIORITAS BIDANG : Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010 - 2014 (Rp. Milyar)	
				2010	2014				
2.7	Penyusunan dan harmonisasi kebijakan tentang masalah sosial anak	Meningkatnya jumlah perlindungan anak dari masalah sosial	1. Jumlah kebijakan perlindungan anak dari masalah sosial		2	4 ^{K)}	Program Perlindungan Anak	Kementerian PP dan PA	20,6
			2. Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi tentang perlindungan anak dari masalah sosial	K/L	2	5			
				prov	5	8			
			3. Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi dalam penyusunan data perlindungan anak dari masalah sosial	K/L	1	1			
				prov	2	17 ^{K)}			
			2.8	Penyusunan dan harmonisasi kebijakan untuk penanganan anak yang berhadapan dengan hukum	Meningkatnya jumlah kebijakan untuk penanganan anak yang berhadapan dengan hukum	1. Jumlah kebijakan penanganan anak yang berhadapan dengan hukum			
2. RUU Peradilan Pidana Anak		1				1			
3. Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi tentang penanganan anak yang berhadapan dengan hukum	K/L	2				6			
	prov	8				7			

BIDANG PEMBANGUNAN : SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA

PRIORITAS BIDANG : Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR		TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010 - 2014 (Rp. Milyar)
					2010	2014			
			4. Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi dalam penyusunan data anak yang berhadapan dengan hukum	K/L	1	3			
				prov	3	15 ^{K)}			
2.9	Penyusunan dan harmonisasi kebijakan perlindungan bagi anak yang berkebutuhan khusus	Meningkatnya jumlah kebijakan perlindungan bagi anak yang berkebutuhan khusus	1. Jumlah kebijakan perlindungan bagi anak yang berkebutuhan khusus		2	3 ^{K)}	Program Perlindungan Anak	Kementerian PP dan PA	17,2
			2. Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi tentang perlindungan anak yang berkebutuhan khusus	K/L	1	8 ^{K)}			
				prov	5	11			
			3. Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi dalam penyusunan data anak yang berkebutuhan khusus	K/L	-	5 ^{K)}			
				prov	-	15 ^{K)}			

BIDANG PEMBANGUNAN : SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA

PRIORITAS BIDANG : Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010 - 2014 (Rp. Milyar)	
				2010	2014				
2.10	Penyusunan dan harmonisasi kebijakan hak sipil anak	Meningkatnya jumlah kebijakan hak sipil anak	1. Jumlah kebijakan hak sipil anak		1	3 ^{K)}	Program Perlindungan Anak	Kementerian PP dan PA	11,2
			2. Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi tentang hak sipil anak	K/L	1	5 ^{K)}			
				prov	10	29 ^{K)}			
			3. Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi dalam penyusunan data hak sipil anak	K/L	1	5			
prov	3	10 ^{K)}							
2.11	Pengawasan pelaksanaan perlindungan anak (KPAI)	Meningkatnya jumlah pengawasan pelaksanaan perlindungan anak	1. Jumlah pengawasan pelaksanaan perlindungan anak di prov/kab/kota	prov	33	33	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	KPAI	43,0
			2. Jumlah rekomendasi hasil pelaksanaan perlindungan anak	laporan	1	5 ^{K)}			
TOTAL								653,2	

KETERANGAN :

^{K)} Angka Kumulatif 5 tahun (2010-2014)



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2010
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH NASIONAL
(RPJMN)
TAHUN 2010--2014**

**BUKU II
MEMPERKUAT SINERGI ANTARBIDANG PEMBANGUNAN**

**BAB III
EKONOMI**

**Diperbanyak Oleh:
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS)
2010**



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
BAB III EKONOMI	II.3-1
3.1 Kondisi Umum	II.3-1
3.1.1 Investasi	II.3-3
3.1.2 Ekspor	II.3-6
3.1.3 Pariwisata	II.3-8
3.1.4 Konsumsi Masyarakat	II.3-10
3.1.5 Keuangan Negara	II.3-11
3.1.6 Moneter	II.3-16
3.1.7 Sektor Keuangan	II.3-20
3.1.8 Industri	II.3-26
3.1.9 Ketenagakerjaan	II.3-30
3.1.10 Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)	II.3-34
3.1.11 Jaminan Sosial	II.3-35
3.2 Permasalahan dan Sasaran Pembangunan	II.3-37
3.2.1 Investasi	II.3-38
3.2.2 Ekspor	II.3-40
3.2.3 Pariwisata	II.3-43
3.2.4 Peningkatan Daya Beli Masyarakat	II.3-45
3.2.5 Keuangan Negara	II.3-47
3.2.6 Moneter	II.3-51
3.2.7 Sektor Keuangan	II.3-53
3.2.8 Industri	II.3-55
3.2.9 Ketenagakerjaan	II.3-58
3.2.10 Koperasi dan UMKM	II.3-64
3.2.11 Jaminan Sosial	II.3-66
3.3 Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan	II.3-67
3.3.1 Peningkatan Investasi	II.3-74
3.3.2 Peningkatan Ekspor	II.3-76
3.3.3 Peningkatan Daya Saing Pariwisata	II.3-78
3.3.4 Peningkatan Daya Beli Masyarakat	II.3-80
3.3.5 Keuangan Negara	II.3-81
3.3.6 Stabilitas Moneter	II.3-85
3.3.7 Stabilitas Sektor Keuangan	II.3-86

3.3.8 Revitalisasi Industri.....	II.3-87
3.3.9 Daya Saing Ketenagakerjaan.....	II.3-89
3.3.10 Pemberdayaan Koperasi dan UMKM.....	II.3-93
3.3.11 Jaminan Sosial.....	II.3-95



BAB III

EKONOMI

Pembangunan di bidang ekonomi ditujukan untuk menjawab berbagai permasalahan dan tantangan dengan tujuan akhir adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat. Tercapainya peningkatan kesejahteraan rakyat memerlukan terciptanya kondisi-kondisi dasar yaitu: (1) pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan; (2) penciptaan sektor ekonomi yang kokoh serta; (3) pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan.

Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan memberikan kesempatan peningkatan dan perluasan kegiatan ekonomi yang berarti memberikan kesempatan peningkatan pendapatan masyarakat. Namun peningkatan kegiatan ekonomi tidak akan dapat berjalan apabila stabilitas ekonomi tidak tercipta. Di samping itu, stabilitas ekonomi juga melindungi agar peningkatan pendapatan masyarakat tidak tergerus oleh kenaikan harga. Hal ini berarti bahwa pertumbuhan ekonomi dan stabilitas ekonomi merupakan kunci utama peningkatan kesejahteraan rakyat.

Meskipun demikian, keberhasilan hal tersebut di atas tidak secara otomatis menjamin terciptanya peningkatan kesejahteraan yang dinikmati oleh masyarakat luas. Penguatan kesejahteraan rakyat yang adil dan merata memerlukan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan.

3.1 Kondisi Umum

Perkembangan perekonomian nasional tidak terlepas dari perkembangan ekonomi dunia yang sedang mengalami krisis ekonomi yang dipicu oleh kasus *subprime mortgage* di Amerika Serikat. Krisis ini telah menyebabkan perekonomian Amerika mengalami resesi yang dalam yang telah menjalar ke negara maju lainnya sehingga berimbas pula ke berbagai negara di dunia termasuk Indonesia.

Selama kurun waktu 2004-2008 perekonomian Indonesia cenderung membaik. Hal ini ditunjukkan dengan naiknya pertumbuhan ekonomi dari 5,0 persen pada tahun 2004 kemudian meningkat menjadi 6,3 persen pada tahun 2007 merupakan tingkat pertumbuhan ekonomi yang untuk pertama kalinya di atas 6,0 persen sejak krisis ekonomi tahun 1998. Pertumbuhan ekonomi Indonesia selama tahun 2008 mencapai 6,1 persen. Dari sisi permintaan, pertumbuhan ekonomi pada tahun 2008, terutama, didorong oleh investasi berupa Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto (PMTB) dan ekspor barang dan jasa yang masing-masing tumbuh sebesar 11,7 persen dan 9,5 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan ekonomi pada tahun 2008, terutama, didorong

oleh sektor pertanian yang tumbuh 4,8 persen. Sementara itu, pertumbuhan industri nonmigas hanya tumbuh sebesar 4,0 persen. Dari sektor tersier, penyumbang terbesar untuk pertumbuhan adalah sektor pengangkutan dan telekomunikasi; listrik, gas, dan air bersih; serta konstruksi yang masing-masing tumbuh sebesar 16,7 persen; 10,9 persen; dan 7,3 persen (Tabel 3.1).

Dampak krisis global mulai dirasakan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional sejak triwulan IV tahun 2008. Pertumbuhan ekonomi triwulan IV tahun 2008 menurun minus 3,6 persen jika dibandingkan dengan triwulan III tahun 2008 ($q-t-q$). Sementara itu, pada triwulan sebelumnya ekonomi tumbuh positif, yaitu 6,2 persen pada triwulan I; 6,4 persen pada triwulan II; dan 6,4 persen pada triwulan III. Krisis global yang berdampak pada turunnya permintaan dunia, menurunnya harga minyak dan komoditas-menyebabkan ekspor barang dan jasa tumbuh negatif 5,5 persen pada triwulan IV 2008 jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Dampak global juga mendorong pembalikan aliran modal dari Indonesia ke luar negeri sehingga investasi/Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) hanya tumbuh 0,8 persen pada triwulan IV jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya.

Penurunan pertumbuhan ekonomi berlanjut sampai dengan triwulan II tahun 2009. Pertumbuhan ekonomi triwulan I tahun 2009 adalah 4,4 persen dan pada triwulan II laju pertumbuhan menurun menjadi 4,0 persen. Pada triwulan III tahun 2009 laju pertumbuhan ekonomi meningkat kembali menjadi 4,2 persen yang menunjukkan tanda-tanda pemulihan ekonomi nasional sejalan dengan membaiknya ekonomi dunia.

Pertumbuhan ekonomi sampai dengan triwulan III tahun 2009 tumbuh 4,2 persen ($y-o-y$). Dari sisi permintaan, pertumbuhan ekonomi didorong oleh pengeluaran pemerintah dan pengeluaran masyarakat yang masing-masing tumbuh 15,1 persen dan 5,2 persen. Sementara itu ekspor masih tumbuh negatif, yaitu -14,1 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan ekonomi terutama didorong oleh sektor pertanian yang meningkat sebesar 3,4 persen; dan sektor tersier, yaitu sektor listrik, gas, dan air; serta pengangkutan dan telekomunikasi yang masing-masing tumbuh 13,9 persen dan 17,6 persen. Sementara itu, industri pengolahan nonmigas hanya tumbuh 1,9 persen.

Pada tahun 2009 untuk mempercepat pemulihan ekonomi, berbagai upaya untuk mengurangi kemerosotan ekspor dan lambatnya pertumbuhan investasi perlu ditingkatkan. Di samping itu, konsumsi masyarakat diupayakan untuk tetap dijaga dengan memelihara daya beli masyarakat melalui pengendalian inflasi ketersediaan pasokan komoditas terutama, kebutuhan pokok dan berbagai program pemberdayaan masyarakat dan bantuan sosial. Efektivitas pengeluaran pemerintah juga ditingkatkan dengan program stimulus untuk menjaga daya beli masyarakat dan peningkatan investasi. Dengan memperhatikan pengaruh eksternal dan berbagai kebijakan yang diambil, pertumbuhan ekonomi tahun 2009 diperkirakan sebesar 4,3 persen.

TABEL 3.1
PERTUMBUHAN EKONOMI
TAHUN 2004-TRIWULAN III TAHUN 2009 (Y-O-Y)

Uraian	Realisasi												
	2004	2005	2006	2007	2008					2009			
					TW I	TW II	TWIII	TW IV	Total	TW I	TW II	TW III	s.d. TW III
Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,0	5,7	5,5	6,3	6,2	6,4	6,4	5,2	6,1	4,4	4,0	4,2	4,2
SISI PENGELUARAN													
Konsumsi Masyarakat	5,0	4,0	3,2	5,0	5,7	5,5	5,3	4,8	5,3	6,0	4,8	4,7	5,2
Konsumsi Pemerintah	4,0	6,6	9,6	3,9	3,6	5,3	14,1	16,4	10,4	19,2	17	10,2	15,1
Investasi	14,7	10,9	2,6	9,4	13,7	12,0	12,2	9,1	11,7	3,5	2,6	4,0	3,4
Ekspor Barang dan Jasa	13,5	16,6	9,4	8,5	12,4	10,6	1,8	9,5	9,5	-18,7	-15,5	-8,2	-14,4
Impor Barang dan Jasa	26,7	17,8	8,6	9,0	18,0	16,1	11,0	-3,5	10,0	-26,0	-23,9	-18,3	-22,7
SISI PRODUKSI													
Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Kehutanan, dan Perikanan	2,8	2,7	3,4	3,4	6,3	4,8	3,4	4,7	4,8	5,2	2,4	2,7	3,4
Pertambangan dan Penggalan	-4,5	3,2	1,7	2,0	-1,7	-0,5	2,1	2,1	0,5	2,4	2,4	6,5	4,1
Industri Pengolahan	6,4	4,6	4,6	4,7	4,3	4,2	4,3	1,8	3,7	1,5	1,5	1,3	1,4
Industri Bukan Migas	7,5	5,9	5,3	5,2	4,6	4,6	4,9	2,1	4,0	1,9	1,8	1,5	1,7
Listrik, Gas dan Air	5,3	6,3	5,8	10,3	12,3	11,8	10,4	9,3	10,9	11,4	15,4	14,6	13,9
Konstruksi	7,5	7,5	8,3	8,6	8,0	8,1	7,6	5,7	7,3	6,3	6,4	8,8	7,2
Perdagangan, Hotel, dan Restoran	5,7	8,3	6,4	8,4	6,9	8,1	8,4	5,6	7,2	0,5	-0,1	-0,6	-0,2
Pengangkutan dan Telekomunikasi	13,4	12,8	14,2	14,0	18,3	17,3	15,5	15,8	16,7	17,1	17,5	18,2	17,6
Kuangan, Real Estat, dan Jasa Perusahaan	7,7	6,7	5,5	8,0	8,3	8,7	8,6	7,4	8,2	6,3	5,3	4,9	5,5
Jasa-jasa	5,4	5,2	6,2	6,6	5,9	6,7	7,2	6,0	6,4	6,8	7,4	5,8	6,7

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS)

3.1.1 Investasi

Salah satu sumber utama pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan adalah investasi. Kegiatan penanaman modal menghasilkan investasi yang akan terus menambah stok modal (*capital stock*). Peningkatan stok modal ini akan meningkatkan produktivitas serta kapasitas dan kualitas produksi.

Peningkatan daya tarik investasi akan dipengaruhi oleh upaya perbaikan iklim investasi. Belum optimalnya kinerja investasi saat ini selain disebabkan oleh penurunan kegiatan ekonomi global juga karena masih adanya permasalahan iklim investasi yang

masih terjadi, dari proses perizinan investasi sampai dengan pelaksanaan realisasi investasi. Hal ini telah menyebabkan menurunnya minat untuk melakukan investasi, baik untuk perluasan usaha yang telah ada maupun untuk investasi baru termasuk persebaran investasi. Untuk itu, upaya peningkatan daya tarik investasi menjadi penting.

Investasi dalam bentuk Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto (PMTB) sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi, selama periode 2005-2008 meningkat rata-rata sebesar 8,6 persen per tahun. Akibat krisis ekonomi dunia, pada triwulan III tahun 2009 PMTB hanya tumbuh sebesar 4,0 persen jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2008. Kinerja investasi tersebut sebagian didukung oleh meningkatnya nilai investasi sektor nonmigas berupa realisasi Izin Usaha Tetap (IUT) dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) yang cenderung meningkat setiap tahunnya.

TABEL 3.2
PERKEMBANGAN REALISASI IZIN USAHA TETAP (IUT) PMDN DAN PMA
TAHUN 2004-2009

Tahun	PMDN		PMA	
	Proyek	Nilai (Rp. miliar)	Proyek	Nilai (USD juta)
2004	130	15.409,4	548	4.572,7
2005	215	30.724,2	907	8.911,0
2006	162	20.649,0	869	5.991,7
2007	159	34.878,7	982	10.341,4
2008	239	20.363,4	1.138	14.871,4
2009*)	197	28.128,2	913	9.317,7

Sumber : Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)

Keterangan : *) Angka Januari-September 2009

Realisasi investasi PMDN meningkat dari Rp15,4 triliun pada tahun 2004 menjadi Rp20,4 triliun pada tahun 2008 atau rata-rata tumbuh sebesar 7,2 persen bahkan pada periode Januari-September tahun 2009 mencapai Rp28,1 triliun (Tabel 3.2). Sementara itu, realisasi investasi PMA telah meningkat dari USD 4,6 miliar pada tahun 2004 menjadi USD 14,9 miliar pada tahun 2008 atau rata-rata tumbuh sebesar 34,3 persen. Pada periode Januari-September tahun 2009 realisasi investasi PMA mencapai USD 9,3 miliar.

Pilihan utama lokasi investasi, baik untuk PMDN maupun PMA adalah Pulau Jawa. Peran PMDN di Pulau Jawa terhadap total PMDN cenderung meningkat dari sebesar 51,2 persen pada tahun 2004 menjadi 74,6 persen pada periode Januari-September tahun 2009 (Tabel 3.3). Selain Pulau Jawa, lokasi utama investasi domestik

berada di Pulau Sumatera.

TABEL 3.3
REALISASI PMDN PER PULAU
TAHUN 2004-2009
(Rp Miliar)

	2004	2005	2006	2007	2008	2009*)
Sumatera	1.431,4	13.501,7	4.504,9	10.754,5	4.840,2	4.081,2
% thd Total	9,3	43,9	21,8	30,8	23,8	14,5
Jawa	7.886,3	14.855,8	13.030,8	18.668,9	12.230,5	20.980,1
% thd Total	51,2	48,4	63,1	53,5	60,1	74,6
Bali & Nusa Tenggara	240,4	66,1	104,9	15,7	29,0	37,0
% thd Total	1,6	0,2	0,5	0,0	0,1	0,1
Kalimantan	5.141,8	1.747,6	2.536,1	1.558,0	1.821,4	1.848,8
% thd Total	33,4	5,7	12,3	4,5	8,9	6,6
Sulaewesi	164,4	509,0	68,6	3.881,6	1.147,4	1.141,3
% thd Total	1,1	1,7	0,3	11,1	5,6	4,1
Maluku	0,0	0,9	0,2	0,0	0,0	0,0
% thd Total	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Papua	545,1	43,1	403,5	0,0	294,7	41,1
% thd Total	3,5	0,1	2,0	0,0	1,4	0,1
Total	15.409,4	30.724,2	20.649,0	34.878,7	20.363,2	28.129,5

Sumber : Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)

Keterangan : *) Angka Januari-September 2009

Meskipun perkembangan pilihan lokasi investasi untuk PMA masih berubah-ubah dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2008, secara keseluruhan masih tetap terkonsentrasi di Pulau Jawa. Realisasi PMA di Pulau Jawa pada tahun 2004 sebesar 70,4 persen meningkat menjadi 90,3 persen pada periode Januari-September tahun 2009 (Tabel 3.4). Hal ini menunjukkan bahwa investasi asing nonmigas di luar Pulau Jawa perlu ditingkatkan.

TABEL 3.4
REALISASI PMA PER PULAU
TAHUN 2004-2009
(USD juta)

	2004	2005	2006	2007	2008	2009*)
Sumatera	851,4	1.232,4	898,1	1.398,5	1.009,9	395,8
% thd Total	18,6	13,8	15,0	13,5	6,8	4,2
Jawa	3.218,1	7.239,8	4.416,4	8.503,5	13.566,9	8.413,65
% thd Total	70,4	81,2	73,7	82,2	91,2	90,3
Bali dan Nusa Tenggara	107,2	102,6	106,2	56,7	95,5	139,5
% thd Total	2,3	1,2	1,8	0,5	0,6	1,5
Kalimantan	368,0	181,8	534,8	300,6	115,2	264,6
% thd Total	8,0	2,0	8,9	2,9	0,8	2,8
Sulaewesi	27,4	145,3	15,5	79,6	65,4	95,6
% thd Total	0,6	1,6	0,3	0,8	0,4	1,0
Maluku	0,0	9,1	20,0	0,0	0,0	5,9
% thd Total	0,0	0,1	0,3	0,0	0,0	0,1
Papua	0,0	0,0	0,6	2,4	18,7	2,8
% thd Total	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0
Total	4.572,1	8.911,0	5.991,6	10.341,3	14.871,6	9.317,9

Sumber: Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)

Keterangan : *) Angka Januari-September 2009

3.1.2 Ekspor

Selama tahun 2004-2008 ekspor Indonesia tumbuh cukup tinggi, dari USD 71,6 miliar pada tahun 2004 menjadi USD 137,0 miliar pada tahun 2008 atau meningkat rata-rata 17,6 persen per tahun. Peningkatan ekspor tersebut didukung oleh kenaikan ekspor migas dan ekspor nonmigas. Ekspor migas meningkat dari USD 15,6 miliar pada tahun 2004 menjadi USD 29,1 miliar pada tahun 2008. Sementara itu, ekspor nonmigas meningkat dari USD 55,9 miliar pada tahun 2004 menjadi USD 107,8 miliar pada tahun 2008 atau meningkat dengan rata-rata sebesar 17,9 persen dalam periode 2004-2008 yang disebabkan oleh peningkatan harga dan volume ekspor (Tabel 3.5).

Tekanan terhadap ekspor Indonesia mulai terjadi pada tahun 2009. Pada periode Januari-September 2009, ekspor migas menurun 51,0 persen akibat menurunnya harga minyak dan gas di pasar internasional. Sementara itu, ekspor nonmigas menurun

sebesar 18,3 persen pada Januari-September tahun 2009 karena menurunnya permintaan dunia sebagai akibat dari krisis ekonomi global. Tekanan terberat terjadi pada ekspor produk industri yang penurunannya mencapai 25,5 persen jika dibandingkan dengan nilai ekspor pada periode yang sama pada tahun 2008 yang disebabkan oleh penurunan, baik harga maupun volume ekspor nonmigas Indonesia.

TABEL 3.5
PERKEMBANGAN NILAI DAN PERTUMBUHAN EKSPOR INDONESIA
TAHUN 2004-2009

Uraian	2004	2005	2006	2007	2008	2009*)
Nilai Ekspor (USD juta)						
Total Ekspor	71.584,6	85.660,0	100.798,6	114.100,9	137.020,4	79.952,6
Ekspor Migas	15.645,3	19.231,5	21.209,5	22.088,6	29.126,3	11.942,8
Ekspor Nonmigas	55.939,3	66.428,5	79.589,1	92.012,3	107.894,1	68.010,3
Pertanian	2.496,2	2.880,3	3.364,9	3.657,8	4.584,6	3.115,7
Industri	48.677,3	55.593,7	65.023,9	76.460,8	88.393,4	51.395,7
Pertambangan	4.761,4	7.946,9	11.191,4	11.885,0	14.906,2	13.600,6
Pertumbuhan (%)						
Total Ekspor	17,2	19,7	17,7	13,2	20,1	-25,7
Ekspor Migas	14,6	22,9	10,3	4,1	31,9	-51,0
Ekspor Nonmigas	18,0	18,8	19,8	15,6	17,3	-18,3
Pertanian	-1,2	15,4	16,8	8,7	25,3	-10,7
Industri	19,1	14,2	17,0	17,6	15,6	-25,5
Pertambangan	19,2	66,9	40,8	6,2	25,4	25,6

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS)

Keterangan : *) Angka Januari-September 2009

Upaya diversifikasi pasar tujuan ekspor nonmigas Indonesia sudah cukup berhasil. Konsentrasi ekspor pada lima negara utama (berdasarkan nilai ekspor) makin menurun setiap tahun, yang diikuti dengan peningkatan ekspor ke pasar lainnya (kelompok negara tujuan ekspor di luar pasar ekspor utama). Konsentrasi ekspor pada lima negara utama terus menurun dari 50,7 persen pada tahun 2004 menjadi 47,0 persen pada tahun 2009 (Tabel 3.6). Pangsa pasar ekspor lainnya juga terus menunjukkan kenaikan dari 49,3 persen pada tahun 2004 menjadi 53,0 persen pada tahun 2009. Sejalan dengan perkembangan perdagangan global, komposisi lima negara yang menjadi pasar ekspor utama selama periode 2004-2009 sedikit mengalami pergeseran. Pada tahun 2004-2006, lima negara yang termasuk ke dalam pasar ekspor

utama adalah Jepang, Amerika Serikat, Singapura, China, dan Malaysia, sedangkan pada tahun 2007-2009 komposisi ini sedikit bergeser menjadi Jepang, Amerika Serikat, China, Singapura, dan India.

TABEL 3.6
PANGSA PASAR EKSPOR NONMIGAS DI PASAR EKSPOR UTAMA DAN LAINNYA TAHUN 2004-2009

Uraian	2004	2005	2006	2007	2008	2009*)
Nilai Ekspor Nonmigas (USD juta)						
Ekspor Nonmigas ke Dunia	55.939,3	66.428,5	79.589,1	92.012,3	107.894,1	68.112,0
Pasar Ekspor Utama **)	28.357,3	33.091,0	40.021,2	44.943,6	51.290,4	31.997,2
Pasar Ekspor Lainnya ***)	27.582,0	33.337,5	39.567,9	47.068,7	56.603,7	36.114,8
Pangsa Pasar (%)						
Ekspor Nonmigas ke Dunia	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Pasar Ekspor Utama	50,7	49,8	50,3	48,8	47,5	47,0
Pasar Ekspor Lainnya	49,3	50,2	49,7	51,2	52,5	53,0

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS)

Keterangan:

*) Angka Januari – September 2009

**) Pasar ekspor utama selama kurun waktu 2004-2006 adalah Jepang, Amerika Serikat, Singapura, China, dan Malaysia (berdasarkan nilai ekspor terbesar). Sedangkan pasar ekspor utama selama kurun waktu 2007-2009 adalah Jepang, Amerika Serikat, China, Singapura, dan India.

***) Pasar ekspor lainnya adalah kelompok negara tujuan ekspor diluar pasar ekspor utama

3.1.3 Pariwisata

Pembangunan kepariwisataan mempunyai peranan penting dalam mendorong kegiatan ekonomi, meningkatkan citra Indonesia, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memberikan perluasan kesempatan kerja. Peran tersebut, antara lain, ditunjukkan oleh kontribusi kepariwisataan dalam penerimaan devisa negara yang dihasilkan oleh kunjungan wisatawan mancanegara (wisman), nilai tambah PDB, dan penyerapan tenaga kerja. Di samping itu, pariwisata juga berperan dalam upaya meningkatkan jati diri bangsa dan mendorong kesadaran dan kebanggaan masyarakat terhadap kekayaan budaya bangsa dengan memperkenalkan produk-produk wisata seperti kekayaan dan keunikan alam dan laut, museum, seni dan tradisi kerakyatan dan alat yang efektif bagi pelestarian lingkungan alam dan seni budaya tradisional.

Pembangunan kepariwisataan pada periode tahun 2004-2009 (RPJMN I), telah menunjukkan hasil sebagai berikut. Jumlah kunjungan wisman meningkat dari 5,0 juta

pada tahun 2005 menjadi 6,4 juta pada tahun 2008, atau meningkat sebesar 28,0 persen. Penerimaan devisa dari hasil kunjungan wisatawan mancanegara meningkat dari USD 4,52 miliar pada tahun 2005 menjadi USD 7,37 miliar pada tahun 2008, atau meningkat sebesar 63,05 persen. Jumlah pergerakan wisatawan nusantara (wisnus) meningkat dari 194,4 juta perjalanan pada tahun 2005 menjadi 225,0 juta perjalanan pada tahun 2008 atau meningkat sebesar 13,41 persen, serta pengeluaran wisnus meningkat dari Rp74,72 triliun pada tahun 2005 menjadi Rp123,17 triliun pada tahun 2008 atau meningkat sebesar 64,84 persen (Tabel 3.7).

TABEL 3.7
PERKEMBANGAN KUNJUNGAN WISATAWAN
TAHUN 2004-2008

Tahun	Wisman		Wisnus	
	Jumlah (Juta orang)	Devisa (USD miliar)	Pergerakan (Juta orang)	Pengeluaran (Rp. triliun)
2004	5,3	4,79	202,8	71,70
2005	5,0	4,52	198,4	74,72
2006	4,9	4,44	204,6	88,21
2007	5,5	5,34	222,4	102,01
2008	6,4	7,37	225,0	123,17

Sumber:Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, 2009

Secara internasional, berdasarkan *The Travel and Tourism Competitiveness Report* 2009 (*World Economic Forum*), daya saing pariwisata Indonesia tercatat pada peringkat ke-81 dari 133 negara. Posisi tersebut masih di bawah Malaysia (32), Singapura (10), dan Thailand (39). Apabila dibandingkan dengan tahun 2008, dimana peringkat Indonesia adalah yang ke-80, peringkat daya saing pariwisata Indonesia mengalami penurunan (Tabel 3.8).

TABEL 3.8
PERINGKAT DAYA SAING PARIWISATA NEGARA ASEAN

Tahun	Negara							
	Indonesia	Kamboja	Malaysia	Filipina	Singapura	Thailand	Vietnam	China
2008	80	112	32	81	16	42	96	62
2009	81	108	32	86	10	39	89	47

Sumber : *The Travel and Tourism Competitiveness Report* 2009 (*World Economic Forum*)

3.1.4 Konsumsi Masyarakat

Salah satu faktor penting yang mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah permintaan domestik dalam bentuk konsumsi masyarakat. Besarnya kontribusi konsumsi masyarakat terhadap perekonomian Indonesia selama ini diukur dari proporsi konsumsi masyarakat terhadap PDB yang mencapai 60,9 persen pada tahun 2008 dan 59,6 persen pada Triwulan I sampai dengan III tahun 2009.

Saat ekonomi dunia mengalami krisis yang masih berlanjut pada tahun 2009, perekonomian negara-negara di dunia sebagian besar tumbuh negatif. Hanya beberapa negara yang mengalami pertumbuhan positif, termasuk China, India, dan Indonesia. Hal ini disebabkan oleh kuatnya permintaan domestik yang bersumber dari konsumsi masyarakat. Pada Triwulan I sampai dengan III tahun 2009 konsumsi masyarakat tumbuh sebesar 5,2 persen. Pada periode tersebut, perekonomian Indonesia tumbuh sebesar 4,2 persen dan sumbangan konsumsi masyarakat terhadap pertumbuhan adalah sebesar 2,6 persen. Di lain pihak, investasi hanya tumbuh sebesar 3,2 persen dan ekspor barang dan jasa tumbuh negatif 14,1 persen.

Upaya mendorong daya beli masyarakat dilakukan dengan cara sebagai berikut (i) meningkatkan stabilitas harga; (ii) melaksanakan berbagai program pemberdayaan masyarakat dan bantuan sosial; serta (iii) mendorong perkuatan perdagangan dalam negeri untuk meningkatkan kelancaran arus barang dalam rangka menjaga ketersediaan barang, terutama, bahan pokok, mendorong transaksi perdagangan domestik, dan meningkatkan kesempatan berusaha. Penjelasan secara rinci mengenai upaya menjaga stabilitas harga dapat dilihat pada prioritas bidang stabilitas moneter, sedangkan program pemberdayaan masyarakat dan bantuan sosial dapat dilihat secara lebih rinci di Bab I mengenai Kebijakan Pengarusutamaan dan Lintas Bidang.

Upaya perkuatan perdagangan dalam negeri selama ini dititikberatkan pada pembenahan sistem distribusi nasional, pengembangan perdagangan berjangka, dan peningkatan iklim usaha perdagangan (terutama melalui persaingan usaha yang sehat). Upaya pembenahan distribusi nasional, difokuskan pada peningkatan efisiensi dan efektivitas sistem distribusi nasional, yang bertujuan adalah untuk meningkatkan kelancaran arus barang dalam upaya menjaga kestabilan harga dan ketersediaan bahan pokok serta menurunkan biaya ekonomi tinggi. Selama periode 2004-2009, pembenahan sistem distribusi diarahkan pada upaya penguatan sarana perdagangan, yang merupakan tempat transaksi perdagangan dan sarana distribusi. Sejak tahun 2004 sampai dengan 2008 telah dibangun 350 unit pasar tradisional di 257 daerah kabupaten/kota di seluruh Indonesia yang diprioritaskan pada daerah-daerah di wilayah perbatasan, daerah terpencil, dan daerah-daerah pascabencana/konflik. Dalam rangka pembenahan dan pembangunan sarana pergudangan untuk meningkatkan ketersediaan stok, telah dibangun 41 unit sarana pergudangan yang terdiri atas 35 unit gudang dan 6 unit silo pada tahun 2009.

Selain itu, upaya yang dilakukan dalam pembangunan perdagangan dalam negeri

adalah pengembangan perdagangan berjangka komoditas untuk menciptakan transparansi dan kestabilan harga. Selama tahun 2004-2008, rata-rata volume transaksi perdagangan berjangka komoditas adalah sebesar 7.823.733 per tahun dengan jumlah perusahaan pialang sebesar 68 perusahaan pada tahun 2008/2009, yang pada tahun 2004 hanya sebesar 22 perusahaan pialang. Di samping itu, telah difasilitasi penyelenggaraan pasar lelang sebagai upaya pembentukan harga yang transparan dan peningkatan kualitas barang yang diperdagangkan. Jumlah penyelenggaraan pasar lelang telah meningkat dari 9 lokasi pada tahun 2004 menjadi 19 lokasi pada tahun 2008 di 18 provinsi.

Dalam kaitannya dengan upaya untuk mendorong pengembangan iklim usaha perdagangan, salah satunya ditandai dengan makin berkembangnya bisnis ritel (tradisional dan modern) dan waralaba di Indonesia. Perkembangan bisnis ritel modern terlihat dari peningkatan omset yang tumbuh dengan pesat dari Rp27 triliun pada tahun 2004 meningkat menjadi sekitar Rp44,8 triliun pada tahun 2007 dan tahun 2008 sudah mencapai sekitar Rp55,4 triliun. Sementara itu, ritel tradisional di Indonesia, tetap memiliki posisi strategis. Selama tahun 2004-2008, omset ritel tradisional meningkat dari Rp108,7 triliun menjadi Rp156,9 triliun (Tabel 3.9).

TABEL 3.9
PERKEMBANGAN OMSET BISNIS RITEL INDONESIA
(Rp Triliun)

Deskripsi	2004	2005	2006	2007	2008
Omset Pasar Modern	27,0	31,9	38,9	44,8	55,4
Total Omset Bisnis Ritel Modern	38,2	45,2	53,2	59,4	70,5
Total Omset Bisnis Ritel Tradisional	108,7	116,2	130,2	138,6	156,9
Total Omset Ritel Nasional	146,9	161,4	183,4	198,0	227,4

Sumber: AC Nielsen 2008, Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (diolah)

3.1.5 Keuangan Negara

Strategi kebijakan fiskal selama kurun waktu 2005-2009 diarahkan untuk melanjutkan dan memantapkan langkah-langkah konsolidasi fiskal guna mewujudkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang sehat dan berkelanjutan. Selain itu, kebijakan fiskal juga diarahkan untuk memberikan stimulus fiskal, terutama di tengah ancaman melemahnya pertumbuhan ekonomi akibat krisis ekonomi global. Langkah konsolidasi fiskal tersebut ditempuh melalui optimalisasi sumber-sumber pendapatan negara, peningkatan efisiensi dan efektivitas belanja negara, serta pemilihan alternatif pembiayaan yang tepat untuk meminimalkan risiko keuangan (*financial risk*).

Dengan berbagai upaya tersebut, dalam kurun waktu 2005-2009 APBN berjalan dengan sehat dan berkelanjutan. Pendapatan negara dan hibah tahun 2005 hingga tahun 2008 meningkat seiring dengan meningkatnya laju perekonomian nasional. Dalam periode yang sama, pendapatan negara dan hibah meningkat rata-rata 18,7 persen tiap tahun atau naik dari Rp495,2 triliun pada tahun 2005 menjadi Rp981,6 triliun pada tahun 2008, yang terutama didorong oleh peningkatan perpajakan sebesar 89,8 (Tabel 3.10).

TABEL 3.10
REALISASI PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH
TAHUN 2004-2009
(Rp Miliar)

Indikator	2004	2005	2006	2007	2008	2009*)
Penerimaan Perpajakan	280.558,8	347.031,1	409.203,0	490.988,7	658.700,8	641.160,6
PNBP	122.545,8	146.888,4	226.950,1	215.119,8	320.604,6	224.525,6
Hibah	262,1	1.304,8	1.834,1	1.697,7	2.304,0	1.112,7
Pendapatan Negara dan Hibah	403.366,7	495.224,2	637.987,1	707.806,2	981.609,4	866.799,0
Rasio Pendapatan Negara dan Hibah thd PDB (%)	17,5	17,8	19,1	17,9	19,8	16,3

Sumber: Kementerian Keuangan

*) Angka Realisasi 31 Desember 2009

Peningkatan yang pesat pada penerimaan perpajakan selain karena faktor pertumbuhan ekonomi, juga karena keberhasilan kebijakan pemerintah dalam bidang perpajakan. Kebijakan ini, antara lain, dilaksanakan dalam bentuk reformasi administrasi perpajakan dan kebijakan penghapusan sanksi pajak (*sunset policy*) telah berhasil meningkatkan jumlah wajib pajak dari 4.050.161 wajib pajak pada tahun 2004 menjadi 14.083.624 wajib pajak pada bulan Mei tahun 2009 (Tabel 3.11).

TABEL 3.11
PERKEMBANGAN JUMLAH WAJIB PAJAK
TAHUN 2004-2009

WP	2004	2005	2006	2007	2008	2009*
Bendahara	204.990	274.478	327.258	360.782	392.509	412.006
Badan	1.116.224	1.124.530	1.226.279	1.344.552	1.481.924	1.538.503
Orang Pribadi	2.728.947	2.959.006	3.251.753	5.431.689	8.807.666	12.133.115
Total	4.050.161	4.358.014	4.805.290	7.137.023	10.682.099	14.083.624
Pertumbuhan (%)	11,0	7,6	10,3	48,5	49,7	31,8

Sumber: Kementerian Keuangan

* Posisi s.d 31 Mei 2009

Di sisi lain, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) meningkat dari Rp146,9 triliun pada tahun 2005 menjadi Rp320,6 triliun pada tahun 2008. Peningkatan penerimaan tersebut, terutama, didorong oleh peningkatan penerimaan sumber daya alam (SDA) minyak bumi dan gas (migas) yang meningkat rata-rata 19,5 persen per tahun atau meningkat dari Rp103,8 triliun menjadi Rp211,6 triliun.

Pendapatan negara dan hibah tetap menunjukkan kinerja yang baik pada tahun 2009 meskipun turun karena adanya dampak krisis ekonomi global. Realisasi pendapatan negara dan hibah per 31 Desember tahun 2009 sebesar Rp866,8 triliun atau turun sebesar Rp114,8 triliun bila dibandingkan dengan realisasi di tahun 2008. Kondisi ini disebabkan oleh melemahnya pertumbuhan ekonomi yang kemudian berdampak pada menurunnya penerimaan perpajakan. Selain itu, karena harga minyak mentah dunia diperkirakan lebih rendah, maka penerimaan PNBP migas akan menurun.

Di sisi belanja negara, realisasi belanja negara dalam kurun waktu yang sama (2005 - 2008) naik rata-rata sebesar 17,9 persen per tahun atau meningkat dari Rp509,6 triliun pada tahun 2005 menjadi Rp985,7 triliun pada tahun 2008. Peningkatan belanja negara tersebut didorong oleh peningkatan belanja pemerintah pusat rata-rata sebesar 17,7 persen per tahun dan belanja ke daerah rata-rata sebesar 18,1 persen per tahun.

Peningkatan realisasi belanja pemerintah pusat tersebut, terutama, didorong oleh peningkatan belanja modal dan bantuan sosial yang masing-masing meningkat rata-rata sebesar 22,0 persen dan 23,4 persen per tahun. Kenaikan belanja modal dan bantuan sosial ini sejalan dengan upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi untuk menciptakan lapangan kerja dan mengurangi kemiskinan. Di sisi lain, kenaikan belanja pemerintah pusat juga didorong oleh kenaikan belanja subsidi, terutama subsidi BBM dan listrik. Meningkatnya belanja subsidi BBM dan listrik berkaitan dengan komitmen

pemerintah untuk tetap menjaga stabilitas harga dan tingkat kesejahteraan rakyat meskipun tekanan harga minyak mentah dunia terus dialami sepanjang periode pelaksanaan RPJMN 2004-2009.

Sejalan dengan semangat desentralisasi dan otonomi daerah, alokasi belanja ke daerah terus meningkat dari tahun 2005 hingga tahun 2008. Peningkatan tersebut didorong oleh peningkatan dana perimbangan sebesar 94,6 persen atau meningkat dari Rp143,2 triliun pada tahun 2005 menjadi Rp278,7 triliun pada tahun 2008. Kenaikan dana perimbangan, utamanya Dana Alokasi Khusus (DAK) diarahkan untuk kegiatan dalam bidang pendidikan, kesehatan, keluarga berencana (KB), infrastruktur jalan dan jembatan, irigasi, minum dan sanitasi, pertanian, kelautan dan perikanan, prasarana pemerintahan daerah, lingkungan hidup, kehutanan, sarana dan prasarana pedesaan, serta perdagangan. Sementara itu, sesuai dengan amanat UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Papua dan UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, realisasi dana otonomi khusus dan penyeimbang meningkat rata-rata sebesar 17,3 persen per tahun atau meningkat dari Rp7,2 triliun pada tahun 2005 menjadi Rp13,7 triliun pada tahun 2008.

Sementara itu, dalam rangka meredam gejolak krisis ekonomi global, pada tahun 2009 pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp73,3 triliun untuk stimulus fiskal. Dana tersebut ditujukan terutama untuk (1) memelihara dan/atau meningkatkan daya beli masyarakat; (2) menjaga daya tahan perusahaan/sector usaha menghadapi krisis global; serta (3) meningkatkan daya serap tenaga kerja dan mengatasi PHK melalui kebijakan pembangunan infrastruktur padat karya.

Pada tahun 2009, realisasi belanja negara per 31 Desember sebesar Rp954,0 triliun yang terdiri atas belanja pemerintah pusat sebesar Rp645,4 triliun dan belanja ke daerah sebesar Rp308,6 triliun sebagaimana terlihat pada Tabel 3.12 berikut:

TABEL 3.12
REALISASI BELANJA NEGARA 2004-2009
(Rp Miliar)

Indikator	2004	2005	2006	2007	2008	2009*)
Belanja Pemerintah Pusat	297.464,0	361.155,2	440.032,2	504.623,4	693.355,9	645.435,5
Belanja Ke Daerah	129.722,9	150.463,9	226.179,9	253.263,2	292.433,4	308.565,6
Belanja Negara	427.176,5	509.632,4	667.128,9	757.649,9	985.730,6	954.001,1
Rasio Belanja Negara Thd PDB (%)	18,5	18,3	20,0	19,2	19,9	17,9

Sumber: Kementerian Keuangan

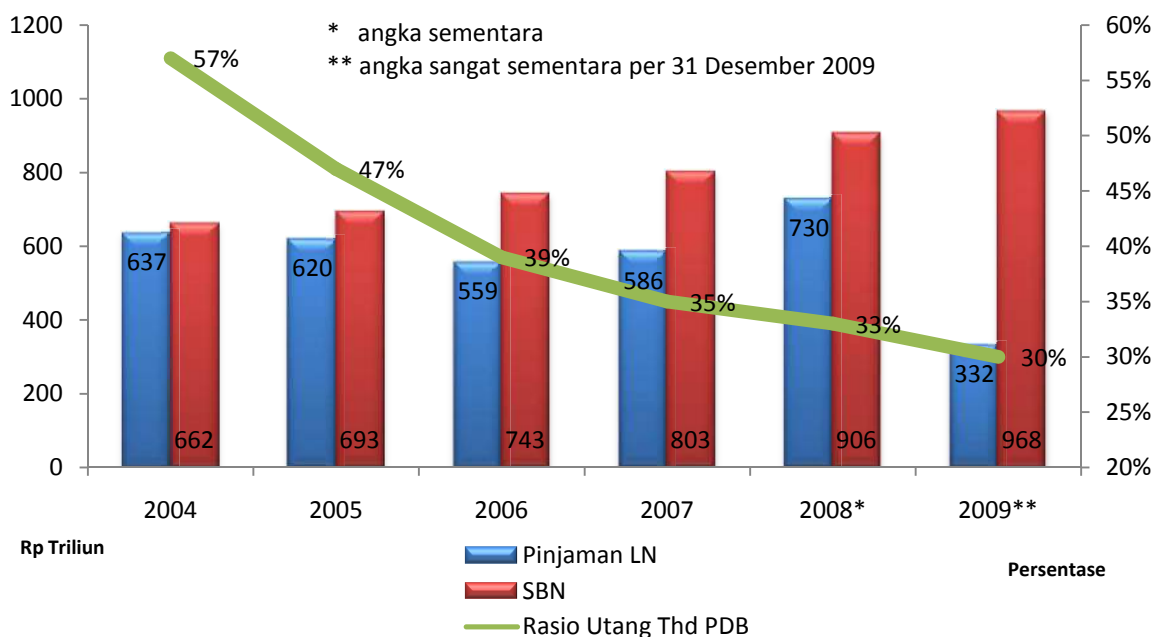
*) Angka Realisasi 31 Desember 2009

Dari uraian tentang belanja terlihat bahwa sepanjang tahun 2005 hingga 2009,

kebijakan fiskal diarahkan untuk memberikan stimulus terhadap perekonomian (*countercyclical policy*). Dengan arah kebijakan tersebut, defisit anggaran cenderung mengalami peningkatan, yakni dari 0,5 persen PDB pada tahun 2005, menjadi 1,6 persen PDB pada tahun 2009.

Untuk memenuhi pembiayaan defisit anggaran tersebut, pemerintah menerapkan pola kebijakan pembiayaan yang konsisten dan diarahkan untuk mengurangi ketergantungan terhadap pembiayaan luar negeri. Hal ini tercermin dari menurunnya utang dalam bentuk pinjaman yang berasal dari luar negeri. Namun, utang yang berasal dari Surat Berharga Negara (SBN) terus meningkat dan menjadi sumber untuk pembayaran kembali pinjaman dan pemenuhan kebutuhan defisit. Dengan kebijakan tersebut, rasio stok utang pemerintah terhadap PDB berhasil diturunkan menjadi 33 persen PDB pada tahun 2008 dan turun menjadi 30 persen pada tahun 2009, dari sebelumnya sebesar 56,6 persen PDB pada tahun 2004 (Gambar 3.1).

GAMBAR 3.1
PERKEMBANGAN STOK UTANG PEMERINTAH
TAHUN 2004-2009



Sumber: Kementerian Keuangan

Pencapaian strategi kebijakan fiskal dalam mendorong pertumbuhan dan menjaga stabilitas ekonomi makro juga didukung oleh peran penting Badan Usaha Milik

Negara (BUMN). Pada tahun 2004, terdapat 158 BUMN dan sejak tahun 2005 hingga tahun 2009 jumlah BUMN tidak mengalami perubahan, yaitu tetap 139 perusahaan (Tabel 3.13). Walaupun jumlah perusahaan tidak berubah, nilai aset bertambah signifikan, yaitu Rp1.365,8 triliun pada tahun 2005 diperkirakan menjadi Rp2.040,2 triliun pada tahun 2009 (menurut data rencana kerja dan anggaran perusahaan). Besaran lain yang menunjukkan perkembangan positif BUMN adalah laba bersih, pengeluaran untuk barang modal (*capital expenditure, capex*), dan pengeluaran operasional (*operational expenditure, opex*).

TABEL 3.13
PERKEMBANGAN BUMN
TAHUN 2004-2009

	Satuan	2004	Realisasi				Perkiraan
			2005	2006	2007	2008	2009
Jumlah BUMN	Perusahaan	158	139	139	139	139	139
Aset	Rp. triliun	1.247,3	1.365,8	1.506,1	1.736,8	1.845,8	2.040,2
Laba Bersih	Rp. triliun	44,1	42,3	53,1	71,4	78,6	70,9
Pengeluaran Modal	Rp. triliun	32,2	39,9	47,9	91,2	128,3	152,1
Pengeluaran Operasi	Rp. triliun	409,1	538,8	621,6	626,2	962,7	836,3

Sumber: Kementerian BUMN

3.1.6 Moneter

Kebijakan moneter selama tahun 2004 sampai dengan 2009 diarahkan untuk menjaga stabilitas harga dalam negeri dan nilai tukar rupiah serta mendorong kegiatan ekonomi secara seimbang. Dengan terjaganya stabilitas harga dan nilai tukar rupiah, diharapkan suku bunga berada pada tingkat yang kompetitif jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga sehingga kegiatan dan pertumbuhan ekonomi akan menjadi lebih kondusif dan berkualitas.

Kebijakan moneter yang dikeluarkan sejak tahun 2005 sampai dengan saat ini secara umum konsisten dengan rezim kebijakan moneter baru yang diterapkan sejak Juli 2005, yaitu kerangka kerja pencapaian sasaran inflasi (*Inflation Targeting Framework – ITF*) dengan menggunakan suku bunga referensi Bank Indonesia (*BI rate*) sebagai sinyal kebijakan moneter. Adapun sasaran inflasi yang ingin dicapai tersebut ditetapkan oleh pemerintah dengan melibatkan para pemangku kepentingan (*stakeholders*). Kebijakan-kebijakan pengendalian inflasi dapat dikelompokkan ke dalam tiga bagian besar, yaitu kebijakan moneter, kebijakan pengaturan dan pemantauan transaksi devisa, serta koordinasi kebijakan antara otoritas moneter dan fiskal serta pemangku kepentingan



lainnya, baik di pusat maupun di daerah (provinsi dan kabupaten/kota). Koordinasi kebijakan antara pemerintah dan Bank Indonesia sangat diperlukan, terutama, di dalam menghadapi berbagai guncangan eksternal, termasuk krisis keuangan global dan menjaga iklim usaha yang kondusif untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat.

Inflasi selama tahun 2004 sampai dengan tahun 2009 secara umum berfluktuasi, tetapi terkendali. Lonjakan dan fluktuasi harga komoditas dunia yang berimbas pada kenaikan BBM dalam negeri telah menyebabkan inflasi meningkat cukup besar pada tahun 2005 dan 2008, yang masing-masing mencapai 17,1 persen dan 11,1 persen (Tabel 3.14). Lonjakan inflasi tahun 2005, terutama, dipicu oleh tingginya harga minyak di pasar dunia yang menyebabkan beban subsidi BBM dalam negeri yang disediakan dalam APBN 2005 tidak mencukupi sehingga dikhawatirkan akan mengganggu kesinambungan fiskal pemerintah. Untuk mengatasi masalah tersebut, pemerintah melakukan penyesuaian harga BBM di dalam negeri pada tahun tersebut sebanyak dua kali, yaitu pada tanggal 1 Maret 2005 dengan tingkat kenaikan rata-rata sebesar 29 persen dan pada 1 Oktober 2005 dengan kenaikan rata-rata sebesar 126 persen.

Meningkatnya inflasi pada tahun 2005 tersebut dikendalikan melalui langkah-langkah kebijakan pengetatan moneter yang konsisten. Secara bertahap, *BI rate* dinaikkan dari 8,50 persen pada bulan Juni 2005 menjadi 12,75 persen pada bulan November 2005 dan bertahan sampai dengan bulan April 2006 kemudian diturunkan bertahap sehingga mencapai 9,75 persen pada bulan Desember 2006. Selain melakukan peningkatan *BI rate* melalui operasi pasar terbuka (OPT), juga dilakukan upaya-upaya untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan likuiditas di pasar uang dan penyempurnaan berbagai instrumen moneter seperti menaikkan Giro Wajib Minimum (GWM) dan menaikkan suku bunga fasilitas simpanan Bank Indonesia (FASBI) 7 hari. Langkah pengetatan moneter tersebut dibarengi dengan upaya-upaya menjaga stabilitas nilai tukar dan mengarahkan ekspektasi masyarakat.

Pada tahun 2007, stabilitas ekonomi dan moneter cukup terjaga stabil. Kebijakan moneter melonggar, penyaluran kredit dan kegiatan ekonomi meningkat. *BI rate* pada bulan Desember 2006 sebesar 9,75 persen diturunkan secara bertahap sehingga menjadi 8,0 persen pada akhir tahun 2007. Inflasi yang pada bulan Desember 2006 sebesar 6,60 persen, menurun menjadi 5,77 persen pada bulan Juni 2007. Stabilitas perkembangan harga tersebut ditopang oleh menurunnya inflasi komoditas makanan yang bergejolak (*volatile foods*), rendahnya inflasi komoditas yang harganya diatur pemerintah (*administered prices*) yang antara lain didukung oleh komitmen Pemerintah untuk tidak mengubah harga BBM dan tarif dasar listrik (TDL), serta kredibilitas kebijakan yang semakin membaik sehingga berpengaruh positif terhadap ekspektasi inflasi masyarakat yang pada gilirannya dapat memfasilitasi pencapaian sasaran inflasi yang ditetapkan.

Setelah melalui periode yang relatif cukup stabil pada tahun 2006 dan 2007, pada awal tahun 2008 tekanan harga BBM dunia kembali menguat dan harga komoditas

pangan di pasar dunia mengalami peningkatan. Sebagai dampaknya, pada bulan Mei 2008, setelah dilakukan penyesuaian harga BBM dalam negeri, laju inflasi meningkat menjadi 11,03 persen pada bulan Juni 2008, dan mencapai puncaknya sebesar 12,14 persen pada bulan September 2008. Namun, pada akhir tahun 2008 laju inflasi menurun menjadi 11,06 persen seiring dengan menurunnya tekanan terhadap inflasi yang utamanya disebabkan oleh semakin menurunnya harga-harga komoditas di pasar dunia dan terjaganya pasokan pangan/beras dalam negeri. Sementara itu, pada tahun yang sama, tekanan kenaikan harga BBM dunia dan krisis keuangan yang terjadi di Amerika Serikat dan Eropa yang dibarengi dengan praktik spekulasi valas menyebabkan kelangkaan dolar AS di dalam negeri.

Sebagai respons terhadap kenaikan inflasi akibat tekanan lonjakan harga BBM dan komoditas pangan di pasar dunia pada tahun 2008 tersebut, *BI rate* dinaikkan secara bertahap dari 8,0 persen pada bulan Desember 2007 menjadi 9,50 persen pada bulan Oktober dan November 2008 kemudian diturunkan menjadi 9,25 persen pada akhir tahun 2008. Tekanan kenaikan harga BBM dunia dan krisis keuangan yang terjadi di Amerika Serikat dan Eropa pada tahun 2008 menyebabkan kelangkaan likuiditas dalam negeri. Kondisi ini diantisipasi oleh BI, antara lain, dengan menerapkan kebijakan pelonggaran likuiditas perbankan.

Selain tekanan kenaikan harga BBM dunia, krisis keuangan yang terjadi di Amerika Serikat dan Eropa menyebabkan meningkatnya permintaan dolar AS untuk membantu pemulihan sektor keuangan dan sektor riil di Amerika Serikat. Investor keuangan asing di negara-negara maju dan berkembang menarik sebagian investasinya di pasar modal dunia dan mengalirkan dolar AS ke Amerika Serikat. Akibatnya, nilai tukar rupiah melemah secara bertahap dari Rp9.419 pada akhir tahun 2007 hingga menjadi Rp12.151/USD pada akhir November 2008. Namun, nilai tukar rupiah kemudian menguat menjadi Rp10.950/USD pada akhir tahun 2008. Untuk mengatasi kelangkaan valuta asing utama dunia, Indonesia mengadakan kerja sama pengadaan valuta asing (*bilateral swap*) dengan Jepang dan China, serta mengadakan *multilateral swap* dengan ASEAN + 3 (Jepang, China dan Korea Selatan).

Dalam memasuki tahun 2009, pergerakan inflasi berbalik menurun, seiring dengan berkurangnya tekanan inflasi sebagai dampak dari penurunan harga BBM dalam negeri dan cukup terjaganya pasokan bahan pangan pokok domestik serta membaiknya ekspektasi inflasi dari para pelaku ekonomi. Hal tersebut pada akhirnya mendorong ekspektasi inflasi yang terus menurun sehingga pada bulan Agustus 2009 inflasi secara tahunan (y-o-y) tercatat sebesar 2,75 persen. Meskipun pada bulan September 2009 inflasi sempat menguat tipis menjadi 2,83 persen (y-o-y) akibat tekanan kenaikan harga karena berlangsungnya puasa dan lebaran, inflasi kembali melemah sehingga pada akhir tahun 2009 menjadi 2,78 persen (y-o-y), jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan tingkat inflasi pada akhir tahun 2008.

Seiring dengan penurunan laju inflasi dan untuk mendorong kegiatan sektor riil,

BI rate diturunkan secara bertahap sehingga menjadi 6,5 persen pada bulan Agustus 2009 dan dipertahankan stabil dalam bulan September sampai dengan Desember 2009. Pada waktu yang sama nilai tukar rupiah juga menguat hingga mencapai Rp10.060/USD pada akhir Agustus 2009 dan semakin menguat menjadi Rp9.400/USD pada akhir tahun 2009. Penguatan nilai tukar rupiah tersebut, antara lain, didukung oleh neraca pembayaran yang surplus; imbal hasil rupiah yang menarik; premi risiko yang menurun; melemahnya mata uang dolar AS terhadap beberapa mata uang utama dunia serta meningkatnya keyakinan investor global kepada kinerja perekonomian Indonesia yang ditunjukkan dengan meningkatnya peringkat Indonesia dari “stable” ke “positive” (menurut laporan Lembaga Pemeringkat Kredit Internasional “Standards & Poor’s” pada bulan Oktober 2009).

TABEL 3.14
PERGERAKAN INFLASI, BI RATE DAN NILAI TUKAR
TAHUN 2004-2009
(Persen)

Periode	Laju Inflasi tahunan	BI Rate*)	Nilai tukar Rp/USD*)
2004	6,40	6,4	9.290
2005	17,11	12,75	9.830
2006	6,60	9,75	9.020
2007	6,59	8,00	9.419
2008	11,06	9,25	10.950
2009	Jan	9,17	11.355
	Feb	8,60	11.980
	Mar	7,92	11.575
	Apr	7,14	10.713
	May	6,04	10.340
	Jun	3,65	10.225
	Jul	2,71	9.920
	Ags	2,75	10.060
	Sep	2,83	9.681
	Okt	2,57	9.545
	Nov	2,41	9.480
	Des	2,78	9.400

Sumber : Badan Pusat Statistik dan Bank Indonesia

Keterangan : *) posisi akhir periode

3.1.7 Sektor Keuangan

Tekanan krisis keuangan global, gejolak harga komoditas, serta resesi ekonomi di berbagai kawasan sejak pertengahan 2007 memberikan pengaruh signifikan terhadap stabilitas ekonomi makro. Secara terkoordinasi, pemerintah dan Bank Indonesia telah mengeluarkan langkah-langkah stabilisasi ekonomi sebagai bagian dari upaya meminimalkan dampak gejolak pasar keuangan global, yang dapat direspons cukup baik oleh pelaku pasar dan masyarakat sehingga dapat menjaga kepercayaan masyarakat pada sektor keuangan di Indonesia. Struktur sektor keuangan di Indonesia tidak mengalami banyak perubahan pada saat industri perbankan yang terdiri atas bank umum dan bank perkreditan rakyat masih mendominasi sistem keuangan Indonesia. Pada industri perbankan, dalam rangka mewujudkan sektor keuangan yang sehat, kuat, dan efisien serta meningkatkan intermediasi perbankan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi terutama mendukung pertumbuhan sektor riil, telah disusun Arsitektur Perbankan Indonesia (API) yang merupakan program jangka panjang. Upaya-upaya dimaksud telah terbukti dengan daya tahan perbankan nasional yang semakin tidak rentan terhadap krisis keuangan global.

Sehubungan dengan kondisi eksternal yang tidak menentu, terutama, pada tahun 2008, telah ditetapkan kebijakan untuk memperkuat ketahanan sektor keuangan domestik khususnya perbankan. Beberapa kebijakan penting perbankan yang dikeluarkan oleh pemerintah selama tahun 2008 antara lain adalah (1) memberi bantuan perbankan yang mengalami kesulitan keuangan yang berdampak sistemik serta menimbulkan potensi krisis yang akan dibiayai oleh pemerintah melalui APBN (Perppu No.2 tahun 2002 tentang Perubahan terhadap UU No. 23 tahun 1998 tentang Bank Indonesia); (2) mengubah besaran nilai simpanan yang dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan/LPS (PP No 66 Tahun 2008 tentang Besaran Simpanan yang Dijamin Lembaga Penjamin Simpanan) dari Rp100 juta menjadi Rp2 miliar yang didahului oleh Perppu Nomor 3 tahun 2008 tentang Perubahan UU No 24 tentang Lembaga Penjamin Simpanan; serta (3) membentuk landasan hukum bagi Jaring Pengaman Sektor Keuangan (Perppu No 4 Tahun 2008 tentang Jaring Pengaman Sektor Keuangan).

Koordinasi yang cukup terjaga antara pemerintah dan Bank Indonesia juga terus diperkuat dalam rangka penanganan dampak krisis global. Seiring dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah tersebut, Bank Indonesia mengeluarkan beberapa kebijakan, antara lain, pelonggaran di dalam pengaturan Giro Wajib Minimum/GWM (PBI No.10/25/PBI/2008 tentang Perubahan PBI No 10/19/PBI/2008 tentang GWM Bank Umum pada Bank Indonesia dalam Rupiah dan Valuta Asing). Terkait dengan peran Bank Indonesia sebagai *lender of the last resort*, dalam periode 2005-2008 telah dikeluarkan beberapa peraturan yang antara lain adalah Fasilitas Likuiditas Intrahari (FLI), Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP), dan Fasilitas Pembiayaan Darurat (FPD).

Di sisi perbankan syariah, pencapaian industri perbankan syariah nasional yang



cukup menonjol pada periode tahun 2004-2009 adalah dikeluarkannya UU No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah sehingga dengan UU tersebut industri perbankan syariah telah memiliki landasan hukum yang kuat. Sebelumnya, telah pula dikeluarkan UU No.19 tahun 2008 tentang Sertifikat Berharga Syariah Nasional (SBSN) yang memberikan dukungan berupa dikeluarkannya instrumen SBSN. Bank Indonesia dalam hal ini juga menerbitkan SBI syariah yang kedua instrumen tersebut sangat membantu perbankan syariah dalam pengelolaan likuiditasnya.

Berbagai kebijakan tersebut dimaksudkan, antara lain, untuk (1) melanjutkan proses penguatan institusional perbankan dalam menghadapi iklim persaingan yang semakin tajam; (2) mengembangkan dan meningkatkan efektivitas peran perbankan dalam proses pembiayaan kepada sektor produktif yang mampu mendorong pertumbuhan perekonomian; (3) meningkatkan kemampuan perbankan dalam menerapkan prinsip kehati-hatian dan praktik perbankan yang sehat serta mengembangkan metode pengawasan perbankan yang bersifat *forward looking*; dan (4) meningkatkan kesiapan industri perbankan nasional dalam memenuhi berbagai prasyarat penerapan *best practices*. Dalam kerangka tersebut berbagai ketentuan yang dikeluarkan difokuskan pada penguatan dan penataan struktur serta permodalan bank, seperti peningkatan penerapan *good corporate governance* (GCG), penanganan risiko dan transparansi bank, pemberian fasilitas atas kelancaran pelaksanaan fungsi intermediasi industri perbankan serta meningkatkan akses ke perbankan bagi masyarakat kurang mampu.

Dalam kerangka pengembangan sektor usaha mikro dan kecil, sektor perbankan diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan melalui penyaluran kredit dengan persyaratan yang mudah dan tingkat bunga yang terjangkau. Dalam hal ini, pelaksanaan program keterkaitan (*linkage program*) antara bank umum dan bank perkreditan rakyat merupakan cara yang realistis, memperhitungkan risiko, dan menggunakan sumber daya secara optimal. Upaya *linkage program* ini diharapkan akan memberikan hasil yang lebih signifikan apabila didukung pula dengan skim penjaminan kredit daerah.

Seiring dengan upaya tersebut, kondisi ketahanan perbankan dalam kurun waktu 2005–2008 dapat dijaga dengan relatif stabil. Hal ini ditunjukkan dengan kondisi CAR bank umum yang berkisar antara 16,0-20,0 persen, yang berada jauh di atas ketentuan sebesar 8,0 persen (Tabel 3.15). Namun, terdapat potensi kenaikan risiko yang tercermin dari kenaikan angka NPL hingga mencapai 3,8 persen pada bulan September 2009, setelah memiliki *trend* yang menurun sejak tahun 2005 yang antara lain disebabkan oleh melambatnya aktivitas ekonomi. Kondisi ini perlu dicermati mengingat pada periode-periode sebelumnya angka tersebut sudah cenderung menurun.

TABEL 3.15
INDIKATOR PERBANKAN NASIONAL
TAHUN 2004-2009
(Persen)

Indikator	2004	2005	2006	2007	2008	2009				
						Tw I	Tw II	Jul	Ags	Sep
<i>Capital Adequacy Ratio (CAR)</i>	19,4	19,3	21,3	19,3	16,8	18,0	16,1	17,3	17,1	17,8
<i>Non Performing Loans (NPL)</i>	4,5	7,6	6,1	4,1	3,2	3,9	3,9	4,1	4,0	3,8

Sumber : Statistik Perbankan Indonesia, Bank Indonesia

Fungsi intermediasi perbankan pada awalnya juga mengalami kenaikan yang tercermin dari peningkatan LDR dan sedikit menurun pada akhir 2008 kemudian berlanjut di 2009. Semula rasio tersebut cenderung meningkat seiring dengan optimisme akan prospek perekonomian, dari 50,0 persen pada akhir tahun 2004 menjadi 66,3 persen pada akhir tahun 2007 dan mencapai puncaknya pada bulan Agustus 2008 menjadi 79,0 persen yang didorong oleh laju pertumbuhan kredit yang cukup tinggi (Tabel 3.16), tetapi sejak September 2008 mulai menurun menjadi 77,7 persen; 74,6 persen (Desember 2008) dan pada bulan September 2009 mencapai 73,6 persen.

TABEL 3.16
PERTUMBUHAN PENGHIMPUNAN DAN PENYALURAN
DANA MASYARAKAT (RUPIAH DAN VALAS)
TAHUN 2004-2009
(Persen)

Indikator	2004	2005	2006	2007	2008	2009				
						Tw I	Tw II	Jul	Ags	Sep
Penghimpunan Dana	8,7	16,8	14,2	19,0	15,0	21,4	17,2	17,6	20,4	16,3
1. Giro	13,6	11,4	21,4	28,6	1,1	12,2	8,1	6,1	18,9	17,2
2. Tabungan	22,0	-4,8	18,2	31,9	13,5	14,7	12,4	13,7	15,0	16,5
3. Deposito	-1,0	34,8	9,4	7,7	23,4	30,8	25,3	26,5	24,7	15,7
Penyaluran Dana	27,3	25,8	14,0	26,0	30,8	25,9	15,9	14,6	13,1	9,6
1. Kredit Investasi	25,9	22,2	14,3	18,2	41,2	38,5	33,6	35,2	32,6	30,0
2. Kredit Modal Kerja	23,3	25,0	17,4	27,5	28,7	23,4	10,4	8,9	6,5	2,8
3. Kredit Konsumsi	38,3	36,7	9,3	25,1	29,9	24,4	19,2	17,7	17,9	15,3
Loan to Deposit Ratio (LDR)	50,0	59,7	61,6	66,3	74,6	73,1	73,2	74,1	74,1	73,6

Sumber: Statistik Ekonomi dan Keuangan Indonesia (SEKI) dan Statistik Perbankan Indonesia (SPI), Bank Indonesia



Di sisi pertumbuhan kredit, sampai dengan September 2009 kredit tumbuh sebesar 9,6 persen (*y-o-y*) dengan nilai Rp1.369,5 triliun. Jika dilihat dari komponennya, pertumbuhan kredit tertinggi terjadi pada kredit investasi sebesar 30,0 persen pada periode yang sama. Di sisi penghimpunan dana, simpanan masyarakat pada bank tumbuh sebesar 16,3 persen (*y-o-y*), yaitu dari Rp1.551,6 triliun pada September 2008 menjadi Rp1.804,3 triliun pada September 2009, lebih tinggi jika dibandingkan dengan pertumbuhan akhir tahun 2008 sebesar 15,0 persen (*y-o-y*). Terjadinya kepercayaan masyarakat menjadi salah satu faktor pertumbuhan simpanan masyarakat yang tetap tinggi.

Penyaluran kredit MKM (Mikro, Kecil, dan Menengah) oleh perbankan juga terus mengalami peningkatan, yakni dari sebesar Rp354,9 triliun pada tahun 2005, tumbuh 89,8 persen menjadi Rp701,4 triliun pada September 2009. Terjadinya krisis keuangan global telah menyebabkan makin selektifnya perbankan dalam menyalurkan kredit. Namun, kredit mikro masih menunjukkan pertumbuhan yang positif. Hal tersebut terjadi karena kredit mikro bersifat *fix rate (flat)*. Selain itu, debitur mikro lebih banyak berusaha di bidang penyediaan kebutuhan dasar untuk pasar domestik, seperti perdagangan, industri pengolahan makanan, produk pertanian dan sayur-sayuran sehingga tidak banyak dipengaruhi krisis keuangan global. Sementara itu, jika dilihat dari tren NPL, kualitas kredit MKM mengalami sedikit penurunan pada tahun 2006 kemudian membaik kembali pada tahun 2007 dan 2008. Meskipun krisis keuangan global menyebabkan peningkatan NPL kredit MKM pada triwulan I 2009, peningkatan NPL tersebut diprediksi tidak akan berlanjut karena adanya daya tahan UMKM dalam menghadapi gejolak ekonomi yang terjadi.

Perbankan syariah juga mengalami pertumbuhan yang cukup pesat. Pada September 2009, pembiayaan yang didistribusikan dan dana masyarakat yang terhimpun oleh perbankan syariah masing-masing mencapai Rp44,52 triliun dan Rp45,38 triliun, yang sebagian besar dialokasikan untuk UMKM dengan porsi yang cukup signifikan, yaitu sekitar 70 persen. Sementara itu, pada periode 5 tahun terakhir, perbankan syariah telah pula berhasil mempertahankan kualitas aset yang cukup baik yang ditunjukkan dengan tingkat *non performing financing (NPF)* yang masih terkendali sekitar 4-5 persen dan tingkat *financing to deposit ratio (FDR)* yang cukup tinggi, yaitu rata-rata di atas 90 persen.

Berkaitan dengan perkembangan lembaga pembiayaan mikro, jumlah BPR konvensional mengalami penurunan akibat terjadinya konsolidasi. Selain itu, pertumbuhan kredit dan penghimpunan dana pada BPR juga mengalami perlambatan. Selama periode 2005-2008, dana pihak ketiga BPR tumbuh rata-rata sebesar 17,29 persen per tahun, yaitu dari Rp 13,2 triliun (2005) menjadi Rp 21,3 triliun (2008) dan melambat menjadi 15,4 persen (*y-o-y*) pada September 2009. Sementara itu, pada periode yang sama, kredit tumbuh sebesar 20,15 persen per tahun, yaitu dari Rp14,7

triliun (2005) menjadi Rp25,5 triliun (2008) dan melambat menjadi 6,75 persen (*y-o-y*) pada September 2009. Namun, fungsi intermediasi LDR BPR relatif tetap stabil, yaitu sekitar 80,0 persen pada periode 2005-2008.

Di sisi pasar modal, setelah mengalami perkembangan yang berarti pada tahun 2006 dan 2007, pasar modal domestik terimbas oleh krisis keuangan yang mulai terasa sejak September 2008, tetapi kemudian mulai bangkit pada awal triwulan II 2009. Perkembangan pasar modal yang cukup pesat pada tahun 2004 agak terhambat karena peningkatan harga BBM dunia dan dalam negeri serta diterapkannya kebijakan moneter ketat pada tahun 2005. Indeks harga saham gabungan sedikit meningkat dari 1.000,23 pada akhir tahun 2004 menjadi 1.162,63 pada akhir tahun 2005. Dengan menurunnya harga BBM dunia, kebijakan stabilitas ekonomi makro yang berhati-hati dibarengi dengan kebijakan moneter yang melonggar, mendorong kembali kegiatan transaksi di pasar modal pada tahun 2006 dan 2007. IHSG meningkat pesat menjadi 1.805,52 pada akhir tahun 2006 dan melonjak menjadi 2.745,83 pada akhir tahun 2007. Namun, memburuknya prospek kondisi perekonomian global, yang dampaknya mulai terasa pada triwulan III 2008, menyebabkan IHSG merosot dan sempat mencapai level terendah pada 28 Oktober 2008 sebesar 1.111,39 dan ditutup sebesar 1.355,41 pada akhir Desember 2008. Secara bertahap, pasar modal domestik mulai bangkit pada awal triwulan II 2009, IHSG meningkat menjadi 1.722,77 pada bulan April 2009 kemudian menjadi 2.026,78 pada bulan Juni 2009 dan 2.467,59 pada September 2009.

Selanjutnya, kapitalisasi pasar modal terhadap PDB juga meningkat dari sebesar 32,3 persen terhadap PDB pada tahun 2004 menjadi sekitar 33,8 persen terhadap PDB pada tahun 2008 (Tabel 3.17). Meskipun terjadi peningkatan dalam nilai nominal kapitalisasi pasar modal, perlu diwaspadai nilai emisi pasar modal yang sejak tahun 2004 terus menurun dari 14,8 persen per PDB menjadi 11,2 persen per PDB pada tahun 2008.

TABEL 3.17
PERKEMBANGAN ASET LEMBAGA KEUANGAN DAN PASAR MODAL
TAHUN 2004-2008
(Rp. Triliun)

	2004		2005		2006		2007		2008	
	Nilai	% PDB	Nilai	% PDB	Nilai	% PDB	Nilai	% PDB	Nilai	% PDB
A. Perbankan	1.288,8	56,1	1.490,2	53,5	1.717,2	51,4	2.014,2	50,9	2.343,1	47,3
- Bank Umum	1.272,1	55,4	1.469,8	52,8	1.693,9	50,7	1.986,5	50,2	2.310,6	46,6
- BPR	16,7	0,7	20,4	0,7	23,4	0,7	27,7	0,7	32,5	0,7
B. Non Perbankan	261,6	11,4	307,5	11,0	370,4	11,1	457,4	11,6	515,1	10,4
- Asuransi	119,9	5,2	139,4	5,0	174,9	5,2	228,8	5,8	243,2	4,9
- Dana Pensiun	56,9	2,5	63,9	2,3	77,6	2,3	91,1	2,3	89,8	1,8
- Perusahaan Pembiayaan	78,9	3,4	96,5	3,5	108,9	3,3	127,3	3,2	168,5	3,4

	2004		2005		2006		2007		2008	
	Nilai	% PDB	Nilai	% PDB	Nilai	% PDB	Nilai	% PDB	Nilai	% PDB
- Perusahaan Modal Ventura	2,4	0,1	2,9	0,1	3,0	0,1	2,8	0,1	2,8	0,1
- Pegadaian *)	3,5	0,2	4,8	0,2	6,0	0,2	7,4	0,2	10,8	0,2
C. Total (A+B)	1550,4	67,5	1.797,8	64,6	2.087,6	62,5	2.471,6	62,5	2.858,2	57,7
D. Emisi Pasar Modal	340,8	14,8	358,4	12,9	383,6	11,5	462,2	11,7	555,4	11,2
- Nilai Emisi Saham	257,8	11,2	267,2	6,3	281,0	8,4	328,3	8,3	407,2	8,2
- Nilai Emisi Obligasi	83,0	3,6	91,2	3,3	102,6	3,1	133,9	3,4	148,1	3,0
Kapitalisasi Pasar Modal	741,6	32,3	864,1	31,0	1.316,9	39,4	2.548,5	64,4	1.675,2	33,8
- Saham	679,9	29,6	801,3	28,8	1.249,1	37,4	1.988,3	50,2	1.076,5	21,7
- Obligasi (korporasi & SUN)	61,6	2,7	62,9	2,3	67,8	2,0	560,1	14,2	598,7	12,1
PDB Nominal	2.295,8		2.785,0		3.338,2		3.957,4		4.954,0	

Sumber: Kementerian Keuangan, BPS, dan Bank Indonesia

Terjaganya stabilitas sektor keuangan tersebut didukung oleh berbagai faktor sebagai berikut. Pertama, telah diterapkan peraturan perbankan dan lembaga keuangan bukan bank (LKBB) yang bersifat preventif terhadap pencegahan risiko kegagalan penempatan investasi. Kedua, telah dibentuk Forum Stabilitas Sistem Keuangan (Juni 2007) guna meningkatkan kerja sama, koordinasi, dan pertukaran informasi dalam rangka stabilitas sistem keuangan. Ketiga, telah semakin membaiknya kesadaran para pelaku industri dalam menerapkan aturan mengenai tata kelola yang baik (*good governance*) dan perlindungan masyarakat pengguna/nasabah. Di samping itu, dengan dilakukannya penggabungan dua bursa (Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya) menjadi Bursa Efek Indonesia pada akhir tahun 2007 dimaksudkan pula agar dapat meningkatkan efisiensi pasar modal yang pada akhirnya dapat meningkatkan ketahanan sektor keuangan.

Selanjutnya, lembaga keuangan bukan bank (LKBB) di luar pasar modal juga telah menunjukkan berbagai perkembangan. Kepercayaan masyarakat terhadap LKBB sudah semakin baik, yang ditunjukkan oleh meningkatnya aset lembaga keuangan nonbank (asuransi, dana pensiun, perusahaan pembiayaan, dan modal ventura) dari Rp261,6 triliun (di tahun 2004) menjadi sekitar Rp503,6 triliun (di tahun 2008) atau meningkat sekitar 17,8 persen per tahun. Namun pangsa terhadap PDB nasional menurun dari 11,4 persen pada tahun 2004 menjadi 10,2 persen pada tahun 2008.

Masuknya Indonesia ke dalam daftar *Non Cooperative Countries and Territories* (NCTTs) oleh *Financial Actions Task Force on Money Laundering* (FATF) pada bulan Juni 2001 membawa dampak negatif bagi perkembangan ekonomi dan tatanan pergaulan secara internasional. Langkah awal yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia untuk

dapat keluar dari keterkucilan tersebut, antara lain, adalah penguatan kerangka hukum (*legal framework*), peningkatan pengawasan di sektor keuangan khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan penerapan prinsip mengenal nasabah, penerapan Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU), yang kemudian diubah dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2003, dan operasionalisasi PPATK sebagai lembaga *financial intelligence unit* (FIU) dan *focal point* di dalam membangun rezim anti pencucian uang yang efektif, penguatan kerja sama antarlembaga domestik dan interternasional serta penegakan hukum.

Menurut data statistik mengenai laporan yang diterima PPATK dari PJK, LTKM (Laporan Transaksi Keuangan yang Mencurigakan) yang disampaikan oleh PJK melalui cara online maupun offline mengalami peningkatan signifikan. Total LTKM yang diterima oleh PPATK hingga akhir tahun 2004 adalah sebanyak 838 LTKM dengan jumlah rata-rata sebanyak 70 LTKM per bulan yang disampaikan oleh sebanyak 71 PJK. Pada akhir tahun 2009 LTKM mengalami peningkatan sangat signifikan menjadi 2.3520 laporan dengan jumlah rata-rata 1.960 laporan per bulan dari 304 Penyedia Jasa Keuangan (PJK) sebagaimana tercermin dalam (Tabel 3.18).

TABEL 3.18
PERKEMBANGAN PENERIMAAN
LAPORAN TRANSAKSI KEUANGAN MENCURIGAKAN (LTKM)
TAHUN 2005-2009

No	Tahun	Jumlah LTKM	Rata-Rata Per Bulan	Penyedia Jasa Keuangan
1.	2005	2.055	171,3	133
2.	2006	3.482	290,2	161
3.	2007	5.831	485,9	193
4.	2008	10.432	869,3	244
5.	2009	23.520	1.960,0	304

Sumber: Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)

Hal yang sama terjadi pada Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT). Jumlah LTKT yang telah dilaporkan oleh PJK kepada PPATK hingga bulan September 2009 mencapai sebanyak 6.939.185 LTKT. Adapun jumlah Laporan Pembawaan Uang Tunai (LPUT) yang diterima oleh PPATK hingga akhir tahun 2008 mencapai 3.014 LPUT dan hingga Akhir tahun 2009 meningkat menjadi sebanyak 4.093 LPUT.

3.1.8 Industri

Pertumbuhan industri pengolahan dalam kurun waktu 2005-2009 cenderung menurun. Pada tahun 2004 industri pengolahan tumbuh 6,4 persen dan khusus untuk industri non-migas mencatat pertumbuhan 7,5 persen (Tabel 3.19). Pada tahun 2005 pertumbuhan industri pengolahan tercatat sebesar 4,6 persen dengan industri

nonmigas 5,9 persen. Angka pertumbuhan ini terus menurun hingga tahun 2008 industri pengolahan tercatat tumbuh 3,7 persen dan industri nonmigas tercatat 4,1 persen. Pada Triwulan I sampai dengan Triwulan III tahun 2009 pertumbuhan industri hanya tercatat sebesar 1,4 persen dengan industri nonmigas tumbuh sebesar 1,7 persen.

TABEL 3.19
PERTUMBUHAN INDUSTRI PENGOLAHAN
TAHUN 2004-2009
(Persen)

Cabang Industri	2004	2005	2006	2007	2008	2009*)
INDUSTRI PENGOLAHAN	6,38	4,60	4,59	4,67	3,66	1,43
Industri Pengolahan Migas	-1,95	-5,67	-1,66	-0,06	-0,33	-1,78
Industri Pengolahan Nonmigas	7,51	5,86	5,27	5,15	4,05	1,72
1. Makanan, Minuman, Tembakau	1,39	2,75	7,21	5,05	2,34	13,31
2. Tekstil, Brg. Kulit dan AlasKaki	4,06	1,31	1,23	-3,68	-3,64	-0,76
3. Brg. Kayu dan Hasil Hutan	-2,07	-0,92	-0,66	-1,74	3,45	-1,98
4. Kertas dan Barang Cetakan	7,61	2,39	2,09	5,79	-1,48	4,53
5. Pupuk, Kimia dan Barang Karet	9,01	8,77	4,48	5,69	4,46	1,15
6. Semen, Brg.Galian Non Logam	9,53	3,81	0,53	3,40	-1,49	-2,88
7. Logam Dasar Besi dan Baja	-2,61	-3,70	4,73	1,69	-2,05	-7,19
8. Alat Angkut, Mesin, Peralatan	17,67	12,38	7,55	9,73	9,79	-5,35
9. Barang Lainnya	12,77	2,61	3,62	-2,82	-0,96	3,80

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS)

Catatan: *) Angka hingga triwulan III-2009

Industri nasional masih didominasi oleh 4 (empat) kelompok industri. Pada Triwulan I sampai dengan Triwulan III tahun 2009 peran industri makanan, minuman, dan tembakau mencapai sekitar 33,1 persen; industri alat angkut, mesin, dan peralatannya sekitar 27,3 persen; industri pupuk kimia, dan barang karet sekitar 12,9 persen. Kemudian, industri tekstil, barang kulit dan alas kaki sekitar 9,3 persen.

Sejalan dengan rendahnya pertumbuhan industri pengolahan maka jumlah tenaga kerja yang diserap oleh sektor industri pengolahan dalam periode tahun 2004 sampai dengan Februari 2009 sedikit meningkat. Pada kurun waktu 2004-2009, jumlah tenaga kerja yang diserap oleh sektor industri pengolahan naik sebesar 1,55 juta orang dari 11,07 juta orang pada 2004 menjadi 12,62 juta orang pada Februari 2009 (Tabel 3.20).

TABEL 3.20
PENDUDUK USIA 15 TAHUN KE ATAS
YANG BEKERJA DI SEKTOR INDUSTRI
TAHUN 2004-2009
(Juta Orang)

Lapangan Pekerjaan Utama	2004	2005 (Februari)	2006 (Februari)	2007 (Februari)	2008 (Februari)	2009 (Februari)
Sektor Industri	11,07	11,65	11,58	12,09	12,44	12,62
Seluruh Sektor	93,72	94,95	95,18	97,58	102,05	104,49

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS)

Sementara itu, nilai ekspor produk industri meningkat sangat pesat dari USD 48,7 miliar pada tahun 2004 menjadi USD 55,6 miliar pada tahun 2005 dan mencapai USD 88,4 miliar pada tahun 2008. Dengan adanya krisis ekonomi global, pada periode Januari-September 2009 ekspor produk industri mencapai USD 51,4 miliar atau menurun -25,5 persen jika dibandingkan dengan nilai ekspor pada periode yang sama tahun 2008 (Tabel 3.5).

Kemampuan sektor industri pengolahan untuk dapat tumbuh ditentukan oleh besarnya penanaman modal, baik penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing. Penanaman modal dalam negeri (PMDN) di sektor industri dalam periode 2004-2009 terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun kecuali pada tahun 2006. Pada tahun 2004 jumlah izin usaha tetap adalah 96 izin usaha tetap (IUT) dengan nilai realisasi investasi sebesar Rp10,5 triliun, pada tahun 2005 menjadi 149 IUT dengan nilai Rp21,0 triliun, pada tahun 2006 (turun) menjadi 96 IUT dengan nilai Rp13,0 triliun, pada tahun 2007 menjadi 101 IUT dengan nilai Rp26,3 triliun, pada tahun 2008 menjadi 188 IUT dengan nilai Rp15,9 triliun, dan pada periode Januari-September tahun 2009 mencapai 128 IUT dengan nilai Rp16,0 triliun (Tabel 3.23). Sementara itu penanaman modal asing di sektor industri dalam periode 2004-2009 terus meningkat dari tahun ke tahun, yaitu pada tahun 2004 sebanyak 248 izin usaha tetap (IUT) dengan nilai realisasi investasi sebesar USD 2,8 miliar, pada tahun 2005 sebanyak 335 IUT dengan nilai USD 3,5 miliar, pada tahun 2006 sebanyak 363 IUT dengan nilai USD 3,6

miliar, pada tahun 2007 sebanyak 390 IUT dengan nilai USD 4,7 miliar, dan pada tahun 2008 sebanyak 495 IUT dengan nilai USD 4,5 miliar, serta pada periode Januari–September tahun 2009 mencapai 356 IUT dengan nilai USD 2,8 miliar.

Sejalan dengan itu, besarnya kredit yang disalurkan perbankan nasional ke sektor industri juga menunjukkan peningkatan dengan jumlah yang cukup berarti, yaitu pada tahun 2004 sebesar Rp143,6 triliun, meningkat menjadi Rp269,1 triliun pada tahun 2008, dan selama periode Januari–Oktober 2009 telah mencapai Rp 237,9 triliun (Tabel 3.21).

TABEL 3.21
PENANAMAN MODAL DAN PENYALURAN KREDIT
DI SEKTOR INDUSTRI
TAHUN 2004 -2009

Keterangan		2004	2005	2006	2007	2008	2009
PMDN*)	Jumlah Ijin Usaha Tetap	96	149	96	101	189	128
	Nilai Realisasi Investasi (Rp triliun)	10,5	21,0	13,0	26,3	15,9	16,0
PMA*)	Jumlah Izin Usaha Tetap	248	335	363	390	495	356
	Nilai Realisasi Investasi (USD miliar)	2,8	3,5	3,6	4,7	4,5	2,8
Penyaluran Kredit (Rp. triliun) **)		143,6	169,7	182,4	203,8	269,1	237,9

Sumber: *) Badan Koordinasi Penanaman Modal : 2009: Januari – September
**) Bank Indonesia : 2009: Januari – Oktober

Persebaran industri masih belum merata di seluruh wilayah Indonesia. Sekitar 66,9 persen dari total industri berada di pulau Jawa, dan sisanya berlokasi di Sumatera, Kalimantan, Bali/NTB/NTT, Sulawesi dan Maluku/Papua. Dalam rangka pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan upaya pembangunan industri lebih merata ke seluruh wilayah Indonesia perlu terus dilakukan. Oleh karena itu, wilayah lain seperti Kalimantan, Sulawesi, Bali, NTB, NTT, Maluku dan Papua masih membutuhkan perhatian lebih besar (Tabel 3.22).

TABEL 3.22
PERSEBARAN INDUSTRI DI INDONESIA
TAHUN 1998, 2003 dan 2006

Wilayah/Propinsi	1998		2003		2006	
	Unit Usaha	Persen	Unit Usaha	persen	Unit Usaha	persen
I. Jawa	1.418.895	61,95	1.893.768	62,50	2.162.269	66,95
1. DKI Jakarta	22.436	1,01	23/733	0,78	37.749	1,17
2. Jawa Barat dan Banten	314.014	13,71	387.983	12,80	539.300	16,70
3. Jawa Tengah	556.748	24,31	798.814	26,36	837.114	25,92
4. DIY	75.131	3,28	133.613	4,41	76.616	2,37
5. Jawa Timur	450.566	19,67	549.625	18,14	671.490	20,79
II. Luar Jawa	871.394	38,05	1.136.342	37,50	1.067.234	33,05
1. Sumatera	288.829	12,61	381.611	12,60	404.827	12,54
2. Kalimantan	97.738	4,27	694.844	4,83	121.018	3,75
3. Bali/NTB/NTT	212.680	9,29	333.989	11,02	278.847	8,63
4. Sulawesi	173.543	7,58	246.614	8,14	231.561	7,17
5. Maluku / Papua	19.604	4,31	27.684	0,91	30.981	0,96
INDONESIA	2.290.298	100,00	3.030.116	100,00	3.229.503	100,00

Sumber: Sensus Ekonomi 2006, Badan Pusat Statistik (BPS)

3.1.9 Ketenagakerjaan

Dalam periode 2005-2009, kondisi ketenagakerjaan menunjukkan perbaikan yang sangat berarti. Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi antara tahun 2005-2009 memungkinkan pertumbuhan lapangan kerja melampaui pertumbuhan angkatan kerja. Dalam kurun waktu yang sama juga terjadi penurunan penganggur di kalangan tenaga kerja usia muda.

Jumlah pengangguran terbuka menurun dari 11,90 juta atau sekitar 11,24 persen tahun 2005, menjadi 8,96 juta atau sekitar 7,87 persen di tahun 2009. Kesempatan kerja yang tercipta selama 2005-2009 tumbuh 2,78 persen rata-rata per tahun atau bertambah 10,91 juta orang (Tabel 3.23). Dari perkembangan selama lima tahun terdapat perubahan yang membaik, antara lain ditunjukkan oleh pertumbuhan penduduk usia 15 tahun ke atas lebih tinggi jika dibandingkan dengan pertumbuhan angkatan kerja, yang mengindikasikan preferensi melanjutkan sekolah ke jenjang lebih tinggi jika dibandingkan dengan mencari pekerjaan.

TABEL 3.23
PENDUDUK USIA 15 TAHUN KE ATAS MENURUT KEGIATAN
TAHUN 2005-2009
(Juta Orang)

No	Kegiatan Utama	2005	2006	2007	2008	2009	Perubahan 2005-2009 (%)
1	Penduduk 15+	158,49	160,81	164,1	166,64	169,33	10,84
2	Angkatan Kerja	105,86	106,39	109,9	111,95	113,83	7,97
3	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	66,79	66,16	66,99	67,18	67,23	0,44
4	Bekerja	93,96	95,46	99,93	102,55	104,87	10,91
5	Penganggur	11,90	10,93	10,01	9,39	8,96	-2,94
	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	11,24	10,28	9,11	8,39	7,87	-3,37

Sumber: BPS, Sakernas bulan Nopember 2005, Agustus 2006, 2007, 2008, 2009.

Bertambahnya jumlah kesempatan kerja tidak dapat dilepaskan dari kondisi perekonomian yang menunjukkan angka pertumbuhan cukup tinggi, yaitu di atas 6 persen pada tahun 2007 dan 2008. Tiap-tiap sektor ekonomi memiliki tingkat sensitivitas yang berbeda dalam hal serapan tenaga kerja. Antara tahun 2005 dan 2009, sektor jasa kemasyarakatan memiliki angka elastisitas yang paling tinggi. Sektor yang diharapkan dapat menciptakan kesempatan kerja yang besar, yaitu pertanian dan industri mengalami serapan yang rendah. Angka elastisitas sektor pertanian sebesar 0,05 adalah termasuk yang terendah setelah sektor industri dan transportasi. Sektor industri memiliki angka elastisitas sebesar 0,51, angka yang cukup tinggi mengingat pertumbuhan ekonomi hanya sebesar 3,52 persen.

Penciptaan lapangan kerja di sektor industri dan pertanian (*tradable*) selama tahun 2005-2009 sebesar 0,55 persen dan sektor jasa dan lainnya (*non tradable*) sekitar 5,52 persen (Tabel 3.24). Sektor industri diharapkan dapat menciptakan tenaga kerja lebih banyak karena hampir 60,0 persen pekerja berada pada lapangan kerja formal.

TABEL 3.24
PENDUDUK USIA 15 TAHUN KE ATAS YANG BEKERJA
MENURUT LAPANGAN PEKERJAAN UTAMA
TAHUN 2005-2009

No	Lapangan Pekerjaan Utama	November 2005		Agustus 2009		Tahun 2005-2009				
		Jumlah (persen)		Jumlah	(persen)	Perubahan Pekerja (juta orang)	Pertb Ek (persen)	Pertb KK (persen)	Elastisitas KK	Pertb Produktif
1	Pertanian	41,31	43,96	41,61	39,67	0,30	3,84	0,18	0,05	3,10
2	Industri	11,95	12,72	12,84	12,24	0,89	3,52	1,81	0,51	1,49
3	<i>Tradable</i> (1 + 2)	53,26	56,68	54,45	51,92	1,19	3,63	0,55	0,15	2,60
4	Bangunan	4,56	4,85	5,49	5,23	1,20	7,65	4,75	0,62	6,50
5	Perdagangan	17,91	19,06	21,95	20,93	4,04	5,34	5,22	0,98	1,60
6	Transportasi	5,65	6,01	6,12	5,83	0,47	14,95	2,02	0,14	12,99
7	Keuangan	1,14	1,21	1,49	1,42	0,35	7,09	6,92	0,98	-1,96
8	Jasa	10,33	10,99	14,00	13,35	3,67	6,39	7,90	1,24	-0,12
9	Kemasyarakatan	1,09	1,16	1,39	1,33	0,30	2,71	6,27	2,31	-4,80
10	Lainnya <i>Non-tradable</i> (4+5+6+7+8+9)	40,68	43,29	50,44	48,09	9,76	6,75	5,52	0,82	2,48
	Total	93,96	100,00	104,87	100,00	10,91	5,54	2,78	0,50	2,95

Sumber: Diolah dari Data Sakernas 2005 dan 2009-BPS

Dalam rangka menciptakan kesempatan kerja berbagai kebijakan yang mendorong peningkatan iklim investasi termasuk iklim ketenagakerjaan terus diperbaiki. Jumlah pengangguran terbuka yang masih relatif tinggi tidak dapat diatasi melalui program-program *ad hoc*. Salah satu yang dilakukan adalah mendorong investasi agar dapat memberikan kesempatan kerja seluas-luasnya bagi penganggur.

Kebijakan dalam rangka meningkatkan investasi dicakup dalam Inpres No. 3 tahun 2006 dan Inpres No. 6 tahun 2007 tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan Inpres No. 5 Tahun 2008 tentang Paket Kebijakan Ekonomi. Ketiga Inpres tersebut menargetkan rencana tindak dan sasaran waktu pelaksanaannya. Titik-titik kelemahan investasi yang sering dikeluhkan oleh dunia usaha antara lain masalah perizinan, perpajakan, kepabeanan, kepastian hukum, peraturan daerah yang menghambat, infrastruktur, dan iklim ketenagakerjaan mulai ditangani. Kecepatan dalam membenahi iklim investasi sangat menentukan respon penanaman modal dengan persaingan yang ketat antarnegara dalam menarik investasi dengan tujuan agar tercipta kesempatan kerja. Berkaitan dengan itu, penciptaan iklim usaha didorong dengan memfasilitasi terselenggaranya lingkungan usaha yang efisien, sehat dalam persaingan, dan

nondiskriminatif bagi kelangsungan dan peningkatan kinerja sektor riil di daerah. Selama tahun 2005-Agustus 2009 penciptaan lapangan kerja melalui investasi PMDN dan PMA menunjukkan peningkatan. Melalui PMDN, tenaga kerja yang tercipta sekitar 422,9 ribu orang, dan PMA menyerap tenaga kerja sebanyak 948,5 ribu orang (Tabel 3.25). Jumlah ini telah memberi sumbangan terhadap daya serap tenaga kerja formal sebesar 42,03 persen.

Krisis ekonomi global telah berdampak pada sektor riil yang berakibat kepada penurunan penyerapan tenaga kerja. Akhir tahun 2008, pemutusan hubungan kerja (PHK) mulai terjadi di berbagai sektor usaha terutama industri. Jumlah perusahaan yang mengajukan permohonan PHK bertambah banyak pada saat memasuki awal tahun 2009, bersamaan dengan berakhirnya kontrak produksi, khususnya untuk barang tujuan ekspor. Pemerintah telah mengeluarkan Surat Peraturan Bersama 4 Menteri tentang Pemeliharaan Momentum Pertumbuhan Ekonomi Nasional dalam Mengantisipasi Perkembangan Ekonomi Global. Peraturan bersama ini dimaksudkan untuk menjaga agar tidak terjadi PHK massal. Surat peraturan bersama ini juga mendorong dilakukannya perundingan bipartit untuk menyelesaikan berbagai masalah ketenagakerjaan. Selain itu, kebijakan untuk memberikan insentif pajak bagi perusahaan dimaksudkan agar perusahaan tidak melakukan PHK dan diminta mengambil langkah-langkah seperti

TABEL 3.25
PERKEMBANGAN REALISASI
PENYERAPAN TENAGA KERJA PADA PMA/PMDN
TAHUN 2005-2009

Tahun	PMA	PMDN	Total PMA/PMDN
	Jumlah Tenaga Kerja	Jumlah Tenaga Kerja	Jumlah Tenaga Kerja
2005	156.071	123.936	280.007
2006	206.945	79.247	286.192
2007	180.879	86.891	267.770
2008	246.049	67.267	313.316
Sept-09	158.596	65.522	224.118
Total TK	948.540	422.863	1.371.403
Penyerapan TK PMA/PMDN terhadap daya serap TK formal (%)	29,07	12,96	42,03

Sumber: Diolah dari Realisasi Investasi PMA-PMDN, BKPM
*)Tenaga Kerja Formal Berdasarkan Data BPS

pengaturan kembali jam kerja (*defensive restructuring*) dan juga mengambil inisiatif untuk dapat melakukan pelatihan kepada para pekerjanya sehingga bila keadaan membaik pekerja telah siap bekerja dengan produktivitas yang lebih baik.

Berkaitan dengan itu, pemerintah telah mendorong agar proses PHK terkait dengan penyelesaian pesangon dan hak-hak pekerja lainnya dirundingkan bersama antara serikat pekerja dan pengusaha. Peran pemerintah sebatas memfasilitasi perundingan berkaitan dengan kebijakan yang memerlukan pembahasan bersama,

antara pemerintah, pengusaha, dan pekerja dituangkan ke dalam PP No. 46 Tahun 2008 mengenai Perubahan atas PP No. 08 tahun 2005 tentang Tata Cara Kerja dan Susunan Organisasi Lembaga Kerja sama Tripartit. Tindak lanjut PP ini, telah terbentuk 24 LKS Tripartit Provinsi dan 307 Kabupaten/Kota. Pemerintah juga telah melengkapi peraturan untuk Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja melalui PP No. 01 Tahun 2009 tentang Perubahan keenam atas PP No. 14 Tahun 1993.

Adanya kebutuhan untuk memperoleh pekerjaan menyebabkan permintaan terhadap lapangan pekerjaan lebih besar dari pada yang tersedia di dalam negeri, sedangkan negara lain membutuhkan pekerja. Bagi negara asal, migrasi internasional pekerja dapat membantu mengurangi beban keterbatasan peluang kerja dan masalah sosial (pengangguran dan kemiskinan). Sedangkan bagi negara tujuan dapat meningkatkan perekonomian. Peluang untuk bekerja ke luar negeri cukup besar ditambah dengan rangsangan akan penghasilan yang relatif lebih tinggi jika dibandingkan dengan penghasilan di dalam negeri merupakan daya tarik bagi pekerja untuk bekerja ke luar negeri.

3.1.10 Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

Pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) merupakan salah satu upaya strategis dalam meningkatkan taraf hidup sebagian besar rakyat Indonesia. Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (RPJPN), pemberdayaan koperasi dan UMKM dipilah menjadi pengembangan usaha kecil dan menengah (UKM), pemberdayaan usaha mikro, dan penguatan kelembagaan koperasi. Pemberdayaan mengemban misi membentuk bangsa yang berdaya saing dan sekaligus melakukan pemerataan pembangunan dan berkeadilan.

Untuk mewujudkan misi bangsa yang berdaya saing, upaya-upaya pengembangan UMKM diarahkan untuk menjadikan para pelaku ekonomi (UMKM) memiliki kemampuan usaha yang berbasis Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) dan berdaya saing. Adapun untuk mewujudkan misi pemerataan pembangunan dan berkeadilan, upaya pemberdayaan diarahkan kepada usaha skala mikro dan kecil, yaitu untuk meningkatkan pendapatan masyarakat yang berpendapatan rendah, khususnya, para pelaku ekonomi di kelompok usaha ini. Sementara itu, dalam penguatan kelembagaan perkoperasian, upaya pengembangan diarahkan agar dapat meningkatkan posisi tawar dan efisiensi kolektif anggotanya, terutama untuk usaha mikro dan kecil yang berkoperasi.

Sesuai dengan arah pengembangan yang dikemukakan dalam RPJPN, untuk mewujudkan bangsa yang berdaya saing, akan ditempuh kebijakan meningkatkan kompetensi melalui perkuatan kewirausahaan dan produktivitas. Adapun untuk mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan, akan ditempuh kebijakan meningkatkan kapasitas usaha dan keterampilan pengelola usaha serta sekaligus mendorong adanya kepastian, perlindungan, dan pembinaan usaha.



Hal tersebut di atas perlu dilakukan dalam kerangka upaya yang lebih strategis dan terintegrasi mengingat jumlah populasi UMKM pada tahun 2007 mencapai 49,8 juta unit usaha atau 99,9 persen dari jumlah unit usaha di Indonesia serta jumlah tenaga kerjanya mencapai 88,7 juta orang atau 96,9 persen dari seluruh tenaga kerja Indonesia, yang tersebar di seluruh sektor perekonomian dan wilayah di Indonesia. Di sisi perkoperasian, pada tahun 2007, jumlah koperasi tercatat sebanyak 149,3 ribu unit dengan jumlah anggota mencapai sekitar 29,1 juta orang. Pada tahun yang sama, UMKM menyumbang 56,2 persen terhadap PDB harga berlaku dan 19,9 persen terhadap ekspor nonmigas nasional. Meskipun sumbangan UMKM belum cukup signifikan, UMKM tetap merupakan tiang penyerap utama tenaga kerja di Indonesia.

3.1.11 Jaminan Sosial

Jaminan sosial merupakan elemen penting dalam *perlindungan sosial* karena menyangkut intervensi dalam melindungi seluruh masyarakat termasuk kelompok miskin dan rentan dalam menghadapi risiko dan ketidakpastian. Risiko dan ketidakpastian, misalnya dalam bentuk krisis ekonomi dan bencana alam berpotensi mendorong masyarakat terutama kelompok miskin dan rentan dalam kondisi yang lebih buruk. Pemerintah, dalam hal ini, wajib menyelenggarakan jaminan sosial yang baik dan layak untuk menghadapi risiko dan ketidakpastian tersebut.

Jaminan sosial (*social security*) memiliki karakteristik utama yaitu dengan mewajibkan pesertanya memberikan kontribusi (iuran) dan menikmati manfaatnya secara tidak langsung. Paradigma berpikir pentingnya jaminan sosial belum berkembang di Indonesia, begitu pula dengan kebijakan di bidang ini yang masih terbatas dan terpisah-pisah. Oleh karena itu, RPJM 2010-2014 menempatkan jaminan sosial sebagai satu prioritas bidang tersendiri, prioritas penataan kelembagaan jaminan sosial yang harus dilaksanakan dalam lima tahun mendatang.

Jaminan sosial dapat berfungsi sebagai bantalan (*cushion*) dalam mengantisipasi risiko yang tidak terduga dan dapat menjadi faktor pendukung produktivitas karena memberikan rasa aman bagi pekerja. Di Indonesia, jaminan sosial saat ini umumnya berupa pemberian tunjangan hari tua, pensiun, dan berbagai skema asuransi.

Pelaksanaan jaminan sosial pada dasarnya sudah berjalan cukup lama. Namun, cakupan penyelenggaraannya masih sangat rendah serta layanan yang terbatas dan tidak terintegrasi. Cakupan pengelolaannya hingga saat ini baru terbatas pada pekerja formal dengan lembaga pengelola yang masih parsial dan manfaat yang jumlahnya masih terbatas. Sebagai contoh, cakupan asuransi kesehatan masih sekitar 48 persen, dengan rincian 18,7 persen asuransi kesehatan pegawai negeri sipil (PNS), TNI/POLRI, tenaga kerja di sektor formal dan asuransi swasta bagi penduduk yang mampu serta 29,3 persen Jaminan Kesehatan Masyarakat atau Jamkesmas. Namun, cakupan Jamkesmas bagi penduduk miskin terus meningkat. Program ini juga telah meningkatkan akses penduduk miskin terhadap pelayanan kesehatan baik di

Puskesmas maupun rumah sakit. Walaupun demikian, program ini belum sepenuhnya dapat meningkatkan status kesehatan masyarakat miskin, terutama untuk daerah tertinggal, terpencil, perbatasan, dan kepulauan.

Sesuai dengan UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), pemerintah berkewajiban menyediakan jaminan sosial secara menyeluruh dan mengembangkan penyelenggaraan sistem jaminan sosial bagi seluruh masyarakat. Jaminan sosial tersebut meliputi jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian. Kemudian, dalam penyelenggaraan SJSN, diperlukan keberadaan dua institusi, yaitu Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). DJSN berfungsi sebagai lembaga yang merumuskan kebijakan umum dan sinkronisasi penyelenggaraannya, sedangkan BPJS bertindak sebagai pelaksana jaminan sosial. Namun, penataan kelembagaan jaminan sosial melalui pembentukan DJSN dan BPJS belum terlaksana sebagaimana diharapkan. DJSN baru terbentuk pada akhir tahun 2008. Sementara itu, keberadaan BPJS masih menunggu selesainya UU tentang BPJS (hingga bulan Agustus 2009 masih dalam tahap penyusunan RUU).

Kondisi penyelenggaraan jaminan sosial di Indonesia saat ini adalah masih rendahnya cakupan jaminan sosial, seperti yang ditunjukkan dalam tabel 3.26.

TABEL 3.26
CAKUPAN PESERTA JAMINAN SOSIAL DI INDONESIA
TAHUN 2008

Landasan Hukum	Pegawai Pemerintah (UU No. 8/1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian)		Pegawai Sektor Swasta (UU No. 14/1969 tentang Ketentuan Pokok Tenaga Kerja)
	Program	TNI dan Polri ¹⁾ 1. Santunan 2. Pensiun 3. Jaminan Kesehatan	Pegawai Negeri Sipil ²⁾ 1. Tabungan Hari Tua 2. Pensiun 3. Jaminan Kesehatan
Peserta Aktif	500.000 orang (peserta jaminan kesehatan: 1.400.000)	4.100.000 orang (peserta jaminan kesehatan: 12.400.000)	7.000.000 orang (peserta non-aktif: 18.400.000 orang, peserta jaminan kesehatan: 14.200.000)
Penerima Manfaat Saat Ini	291.381 orang	1.910.607 orang	661.720 orang

Sumber :

- 1) PT ASABRI
- 2) PT TASPEN
- 3) PT JAMSOSTEK



Data pada tahun 2007 hanya sekitar 12 persen pekerja di Indonesia yang menjadi peserta program jaminan sosial, dengan perincian jumlah pekerja formal mencapai sekitar 31,9 juta pekerja dan pekerja sektor informal sebanyak 72,6 juta pekerja (Sakernas Februari 2009). Permasalahan lainnya adalah kekakuan pasar kerja (labor market rigidity) sektor formal dalam sistem pengupahan, yang pada akhirnya kurang mendukung para pekerja untuk berpartisipasi dalam sistem jaminan sosial pekerja. Sementara itu, penyediaan jaminan sosial bagi pekerja sektor informal hingga saat ini baru terbatas pada tahap uji coba dengan cakupan sangat terbatas yang dilaksanakan oleh dua institusi; Kementerian Sosial (Kemensos) melalui Asuransi Kesejahteraan Sosial (Askesos) dengan cakupan 144.600 kepala keluarga (Kemensos, 2008); dan Jamsostek yang mencakup 800 ribu pekerja informal.

Khusus program bantuan sosial pemeliharaan kesehatan yang saat ini dilaksanakan oleh Depkes, yaitu Jamkesmas, dalam 5 tahun ke depan, sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 40 SJSN, agar asuransi kesehatan menjangkau seluruh masyarakat termasuk masyarakat miskin, akan ditransformasi menjadi jaminan sosial berbasis asuransi. Kewajiban iuran masyarakat miskin akan ditanggung pemerintah pusat dan daerah masing-masing bagi masyarakat miskin yang telah terdata oleh BPS Pusat dan Pemerintah Daerah.

3.2 Permasalahan Dan Sasaran Pembangunan

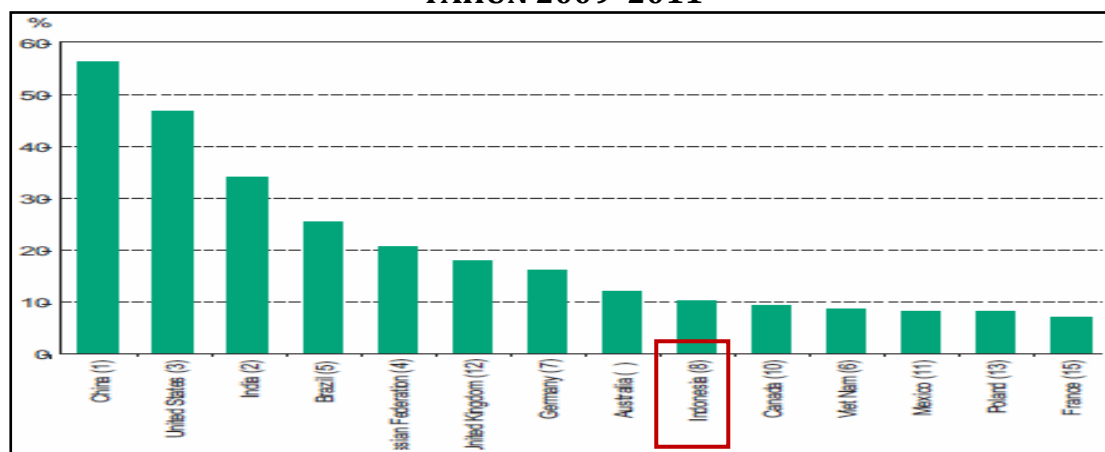
Dampak yang ditimbulkan oleh krisis ekonomi global terhadap perekonomian Indonesia mulai dirasakan pada triwulan akhir 2008. Pertumbuhan ekonomi triwulan IV tahun 2008 menurun sebesar minus 3,6 persen dibandingkan triwulan III tahun 2008 ($q-t-q$) dan meningkat 5,2 persen ($y-o-y$) dibandingkan dengan triwulan IV tahun 2007. Pada semester I tahun 2009, pertumbuhan ekonomi hanya meningkat 4,2 persen ($y-o-y$). Perlambatan pertumbuhan ekonomi disebabkan oleh menurunnya ekspor serta melambatnya pertumbuhan investasi. Sementara itu, dari sisi lapangan usaha perlambatan pertumbuhan ekonomi disebabkan oleh menurunnya laju pertumbuhan sektor industri.

Dengan perkiraan bahwa ekonomi global mengalami pemulihan pada tahun 2010 dan dengan berbagai kebijakan yang akan ditempuh, sasaran pertumbuhan ekonomi periode 2010—2014 ditetapkan sebesar 6,3-6,8 persen dan pertumbuhan ekonomi diharapkan akan mencapai 7 persen satu tahun sebelum periode RPJMN 2010-2014 berakhir.

3.2.1 Investasi

Sebagai dampak dari pelemahan ekonomi global, salah satu tantangan terbesar yang masih akan dihadapi dalam beberapa tahun ke depan adalah kecenderungan menurunnya aliran investasi dari negara-negara maju. Namun demikian, prospek untuk berinvestasi di Indonesia cukup baik. UNCTAD (2009) dalam *World Investment Prospect 2009-2011* melaporkan bahwa prospek untuk berinvestasi di Indonesia menduduki peringkat ke-8 (delapan) atau cukup prospektif, terutama karena besarnya pasar dan ketersediaan sumber daya alam. Meskipun demikian, ke depan keunggulan berupa besarnya pasar dan sumberdaya alam yang dimiliki perlu didukung dengan pelayanan perizinan dan ketersediaan infrastruktur untuk meningkatkan daya tarik investasi bagi para investor.

GAMBAR 3.2
NEGARA TUJUAN PALING ATRAKTIF BAGI INVESTASI LANGSUNG ASING
TAHUN 2009-2011

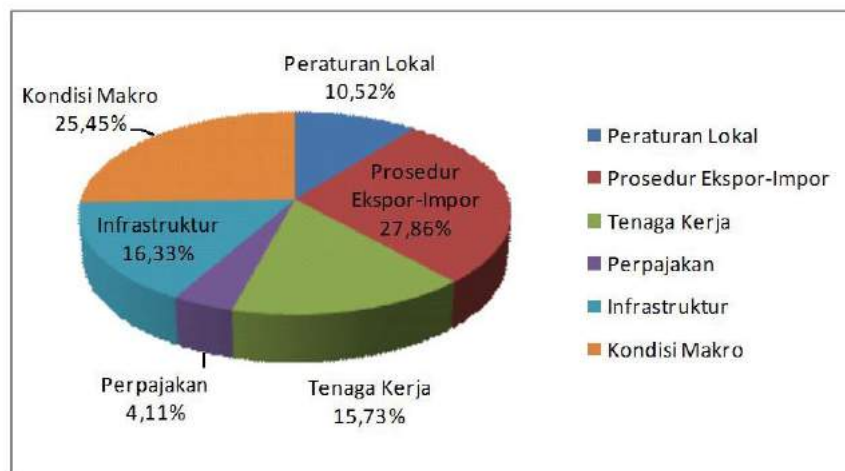


Sumber: *World Investment Prospect*, UNCTAD 2009

Meskipun prospek untuk berinvestasi di Indonesia cukup baik, Indonesia belum optimal dalam hal menarik investor asing. Kondisi bisnis di Indonesia dinilai oleh berbagai survei masih belum cukup bersaing dibandingkan dengan negara-negara lain terutama dalam satu kawasan. Hasil survey yang dilakukan oleh *World Economic Forum* terhadap 134 negara menunjukkan bahwa Indonesia menduduki peringkat ke-55 berdasarkan *Global Competitiveness Index (GCI) 2008-2009*. Dalam hal kebebasan berusaha yang ditentukan dalam *Index of Economic Freedom*, pada tahun 2009 Indonesia menduduki peringkat ke-131 dari 181 negara yang disurvei. Demikian halnya untuk kemudahan usaha, Indonesia masih menduduki peringkat 122 dari 183 negara yang disurvei oleh IFC-World Bank untuk *Doing Business* tahun 2010. Secara umum, baik fasilitas maupun mekanisme berinvestasi di Indonesia masih tertinggal dibandingkan

dengan Singapura, Malaysia, China, dan Thailand. Selain itu, berdasarkan survei daya saing yang dilakukan Bappenas dan LPEM UI (2008) terhadap 200 perusahaan (Gambar 3.3), terlihat bahwa prosedur perizinan serta waktu dan biaya yang dibutuhkan untuk proses ekspor dan impor merupakan faktor utama penghambat berinvestasi di Indonesia, yang diikuti dengan kondisi makro ekonomi, dan ketersediaan infrastruktur.

GAMBAR 3.3
FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP IKLIM INVESTASI



Sumber: *Perdagangan dan Investasi di Indonesia: sebuah catatan tentang daya saing dan tantangan kedepan*, Bappenas dan LPEM UI (2008)

Berdasarkan berbagai hasil survei tersebut diatas permasalahan yang dihadapi untuk meningkatkan investasi adalah (a) belum optimalnya pelaksanaan harmonisasi, sinkronisasi, dan simplifikasi berbagai kebijakan, baik antarinststitusi di pusat dan antara pusat dengan daerah; (b) kualitas infrastruktur yang kurang memadai; (c) masih cukup panjangnya proses perizinan investasi sehingga masih tingginya biaya perjinan investasi dibandingkan dengan negara-negara kompetitor; (d) belum tercukupinya pasokan energi yang dibutuhkan untuk kegiatan industri; (e) masih cukup banyak peraturan daerah (perda) yang menghambat iklim investasi; (f) masih terkonsentrasinya sebaran investasi di pulau Jawa, dan (g) belum optimalnya pelaksanaan alih teknologi.

Pada periode 2010—2014, sasaran pertumbuhan realisasi investasi nonmigas yang berasal dari total PMDN dan PMA sekitar 15,0 persen sampai dengan 18,6 persen per tahun. Realisasi PMDN tahun 2010 diperkirakan mencapai antara Rp35,3 triliun sampai dengan Rp39,5 triliun, dan pada tahun 2014 diharapkan dapat mencapai sekitar Rp61,7 triliun sampai dengan Rp78,0 triliun. Sedangkan untuk realisasi PMA pada tahun 2010 diperkirakan mencapai sekitar USD 13,1 miliar sampai dengan USD 13,2 miliar, dan pada tahun 2014 diharapkan dapat mencapai USD 22,9 miliar sampai dengan USD

26,1 miliar. Upaya untuk meningkatkan besarnya aliran investasi melalui PMA dan PMDN, antara lain akan dilaksanakan melalui: (1) peningkatan kualitas pelayanan perizinan yang mudah diakses, transparan, dan cepat di seluruh Indonesia; (2) pemenuhan kebutuhan infrastruktur dan energi; (3) penyediaan tenaga kerja baik jumlah maupun kualitas; (4) penyediaan pola insentif untuk mempercepat alih teknologi; dan (5) pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

3.2.2 Ekspor

Perekonomian dunia sepanjang tahun 2009 masih terkontraksi. Namun dengan mulai meredanya tekanan pada perdagangan dunia, kondisi permintaan global diharapkan akan mulai membaik di semester II tahun 2009. Perbaikan ini didukung oleh 2 (dua) faktor penting, yaitu stimulus fiskal yang dilakukan oleh hampir semua negara yang terkena krisis dan kesepakatan dunia untuk menghindari upaya proteksi dalam meredam dampak krisis.

Dalam periode 2010-2014, persaingan untuk meningkatkan ekspor akan semakin kuat. Oleh sebab itu, agar daya saing ekspor semakin meningkat, berbagai permasalahan yang terkait dengan perdagangan luar negeri harus disederhanakan. Permasalahan pokok dalam pengembangan ekspor, antara lain adalah sebagai berikut.

Pertama, kurangnya akses pasar, sehingga ekspor Indonesia masih terkonsentrasi pada beberapa negara tujuan ekspor. Meskipun ketergantungan terhadap beberapa negara tujuan ekspor utama sudah semakin berkurang, namun upaya untuk melakukan diversifikasi pasar masih perlu ditingkatkan.

Kedua, kualitas produk yang belum sesuai dengan permintaan dan standar internasional. Sebagai contoh, produk ekspor terutama bahan dan produk makanan serta produk kayu dan hasil olahannya sering menghadapi hambatan di pasar ekspor negara maju karena adanya permasalahan standar kesehatan, standar lingkungan, dan standar produksi (*Good Manufacturing Practices*). Hambatan yang sering dihadapi oleh produk ekspor Indonesia adalah ketatnya kebijakan impor dalam rangka perlindungan terhadap konsumen dan kelestarian lingkungan di negara maju.

Ketiga, meningkatnya hambatan nontarif di pasar tujuan ekspor, karena adanya kecenderungan berbagai negara menerapkan kebijakan mengamankan perekonomian untuk meredam dampak krisis global.

Keempat, belum optimalnya upaya untuk meningkatkan keberagaman produk ekspor di pasar global. Padahal, produk ekspor yang lebih beragam menjadi faktor penting dalam menghadapi tingkat persaingan produk ekspor dari sesama negara berkembang di pasar internasional yang diperkirakan akan semakin ketat.

Kelima, belum optimalnya pemanfaatan berbagai kesepakatan perdagangan (seperti: perjanjian perdagangan bebas) yang dapat dimanfaatkan sebagai wahana untuk meningkatkan ekspor ke negara mitra, baik multilateral, regional, maupun

bilateral.

Keenam, masih belum optimalnya upaya fasilitasi ekspor-impor, yang tercermin dari: (i) belum optimalnya pemanfaatan berbagai skema perdagangan, seperti imbal dagang sebagai alternatif pola perdagangan dalam rangka penetrasi di pasar non-tradisional; (ii) waktu yang diperlukan untuk ekspor termasuk lebih lama dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya, seperti Thailand, Singapura, dan Malaysia; (iii) Jumlah dokumen untuk ekspor yang belum berkurang dalam beberapa tahun terakhir; serta (iv) biaya ekspor per kontainer yang cukup tinggi dibandingkan dengan negara tetangga akibat sistem logistik yang tidak efisien (Tabel 3.27). Penyebab utama ketidakefisienan ini adalah tingginya biaya transportasi kargo, belum efisiennya manajemen di pelabuhan, serta rendahnya kualitas dan kuantitas infrastruktur.

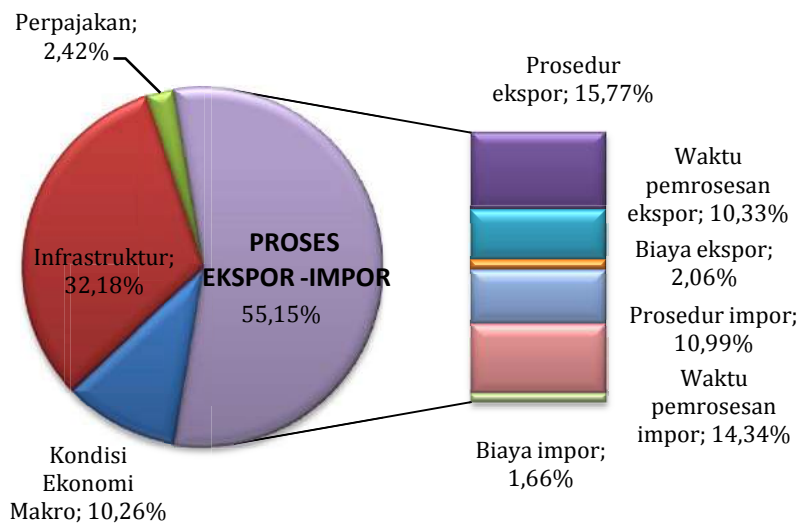
TABEL 3.27
PERBANDINGAN BIAYA DAN WAKTU EKSPOR DI BEBERAPA NEGARA

Kawasan/Negara	Waktu Untuk Melakukan Ekspor (Hari)	Biaya Ekspor (USD per kontainer)	Dokumen Untuk Melakukan Ekspor (Jumlah)
OECD	10,5	1.089,7	4,3
Asia Timur dan Pasifik	23,1	909,3	6,7
Amerika Latin dan Karibia	18,6	1.243,6	6,8
Asia Selatan	32,4	1.364,1	8,5
Sub-Sahara Afrika	33,6	1.941,8	7,8
Indonesia	21	704	5
Singapura	5	456	4
Thailand	14	625	4
Malaysia	18	450	7
China	21	500	7
Vietnam	22	756	6

Sumber: *Doing Business, World Bank* (2010)

Berdasarkan hasil survei Bappenas dan LPEM UI (2008) terhadap 200 perusahaan di 5 (lima) kota Indonesia, faktor terpenting yang mempengaruhi daya saing perdagangan luar negeri adalah proses ekspor-impor; yang menurut persepsi dunia usaha faktor ini memberikan kontribusi sebesar 55,17 persen (dari total sebesar 100 persen) terhadap peningkatan daya saing perdagangan luar negeri (Gambar 3.4). Oleh sebab itu, upaya untuk meningkatkan fasilitas ekspor akan berperan penting dalam meningkatkan daya saing perdagangan luar negeri.

GAMBAR 3.4
FAKTOR PENTING YANG MEMPENGARUHI DAYA SAING
PERDAGANGAN LUAR NEGERI



Sumber: *Perdagangan dan Investasi di Indonesia: sebuah catatan tentang daya saing dan tantangan kedepan*, Bappenas dan LPEM UI (2008)

Sasaran pembangunan perdagangan luar negeri adalah pertumbuhan ekspor nonmigas sebesar 7,0-8,0 persen pada tahun 2010 yang secara bertahap meningkat menjadi sebesar 14,5-16,5 persen pada tahun 2014. Untuk mencapai target ini, dilakukan berbagai upaya:

1. Meningkatkan diversifikasi pasar tujuan ekspor, yang diukur dengan menurunnya tingkat kebergantungan kepada lima pasar tujuan ekspor terbesar (pasar ekspor tradisional);
2. Meningkatkan kualitas dan keberagaman produk ekspor, yang diukur dengan meningkatnya indeks diversifikasi produk ekspor nonmigas;
3. Meningkatkan kelancaran dan kemudahan ekspor, yang akan ditandai dengan:
 - a. meningkatnya jumlah pengguna perizinan ekspor/impor *online* (INA-TRADE);



- b. menurunnya waktu pemrosesan perizinan ekspor/impor;
- c. meningkatnya jumlah perizinan ekspor/impor *online*.

3.2.3 Pariwisata

Kinerja pembangunan kepariwisataan pada tahun 2004-2009 telah menunjukkan hasil yang baik. Namun, kinerja tersebut pada tahun 2010-2014 perlu lebih ditingkatkan sehubungan dengan peran strategis kepariwisataan dalam upaya mewujudkan perekonomian yang tangguh dan peningkatan kesejahteraan rakyat. Untuk meningkatkan kinerja pariwisata, berbagai masalah dan tantangan dalam kepariwisataan harus diatasi.

Beberapa permasalahan dan tantangan yang dihadapi, antara lain adalah sebagai berikut.

1. Kesiapan tujuan pariwisata nasional. Tujuan pariwisata yang di dalamnya terdapat daya tarik pariwisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait, memerlukan pengelolaan yang sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan, dan bertanggung jawab sehingga tujuan mampu memenuhi kebutuhan wisatawan dan mampu bersaing di pasar global. Kondisi saat ini menunjukkan bahwa tujuan pariwisata Indonesia belum dapat bersaing di tingkat global yang ditandai dengan peringkat daya saing pariwisata yang berada di posisi 81 berdasarkan WEF (*World Economic Forum*). Selain itu, kesiapan tujuan nasional masih menghadapi kendala, antara lain terbatasnya dukungan: a) aksesibilitas seperti prasarana transportasi darat, laut dan udara, dan prasarana penunjang pariwisata; b) ketersediaan fasilitas umum; c) penataan dan diversifikasi daya tarik pariwisata, seperti penerapan pembangunan pariwisata berkelanjutan (*sustainable tourism development*), penilaian tujuan (*destination assessment*), dan pemanfaatan basis data; serta d) kondisi keamanan dan kenyamanan di tujuan pariwisata. Oleh karena itu, tantangan pembangunan pariwisata ke depan adalah meningkatkan kesiapan tujuan pariwisata nasional agar mampu bersaing di pasar global dan memenuhi kebutuhan wisatawan, dengan tetap memperhatikan prinsip pembangunan pariwisata berkelanjutan.
2. Jumlah dan nilai investasi di bidang pariwisata. Investasi pariwisata, baik yang berasal dari sumber pendanaan domestik maupun luar negeri, diperlukan untuk mendukung kegiatan pariwisata baik langsung maupun tidak langsung. Jumlah investasi di bidang pariwisata menunjukkan peran swasta dan masyarakat dalam pembangunan pariwisata masih belum optimal. Hal ini disebabkan antara lain oleh kondisi ekonomi dan situasi keamanan, serta iklim investasi yang belum kondusif. Oleh karena itu, tantangan pembangunan pariwisata ke depan adalah

meningkatkan iklim investasi yang kondusif di bidang pariwisata dalam rangka meningkatkan investasi di bidang pariwisata di Indonesia.

3. Pemanfaatan kemajuan teknologi komunikasi dan informasi (*information and communication technologies/ICTs*) sebagai sarana pemasaran dan promosi. Teknologi komunikasi dan informasi memiliki peran penting dalam meningkatkan efektivitas pemasaran dan distribusi pariwisata serta memberikan kemudahan bagi wisatawan untuk memperoleh informasi kepariwisataan. Kondisi saat ini menunjukkan bahwa ketersediaan sarana ICTs, seperti internet, saluran telepon, *broadband* untuk mendukung aktivitas *online* para wisatawan belum memadai, baik untuk pemasaran pariwisata maupun memenuhi kebutuhan wisatawan dalam mendapatkan informasi kepariwisataan. Untuk itu, tantangan ke depan adalah meningkatkan kemampuan dalam memanfaatkan kemajuan ICT dalam pemasaran pariwisata, pengembangan tujuan pariwisata, strategi pengembangan *e-business* dan *e-marketing* untuk menjangkau pasar yang jauh lebih luas dan tanpa batas.
4. Kualitas dan kuantitas serta profesionalisme sumber daya manusia (SDM) pariwisata. SDM pariwisata yang berkualitas diperlukan dalam memajukan pembangunan kepariwisataan nasional, baik untuk mendukung pemasaran dan pengembangan tujuan pariwisata, mulai dari tingkat manajerial dan perencana sampai dengan *front-liner* (tenaga kerja yang berhubungan langsung dengan wisatawan). Kondisi saat ini menunjukkan bahwa jumlah, jenis, dan kualitas SDM di bidang pariwisata masih terbatas. Hal ini terutama disebabkan oleh: a) sarana dan prasarana pendidikan pariwisata yang belum memadai; dan b) penerapan standar dan kurikulum pendidikan pariwisata berbasis kompetensi dan berstandar internasional belum optimal. Oleh karena itu, tantangan pembangunan SDM pariwisata adalah meningkatkan kualitas dan kuantitas serta profesionalisme SDM pariwisata berbasis kompetensi dan berstandar internasional.
5. Kemitraan dan kerja sama antara pemerintah dan swasta termasuk masyarakat (*public and private partnership*). Pembangunan pariwisata memerlukan kerja sama yang terpadu antara pemerintah (pusat dan daerah) dan swasta (industri/usaha pariwisata) dan peran aktif masyarakat. Kondisi saat ini menunjukkan kerja sama antara pemerintah dan swasta dalam pengembangan pariwisata belum optimal. Oleh karena itu, tantangan pembangunan kepariwisataan adalah meningkatkan kerja sama dan kemitraan yang efektif dan efisien antara pemerintah, swasta, dan masyarakat.

Sasaran pembangunan kepariwisataan untuk tahun 2010–2014 adalah:

1. meningkatnya jumlah wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara sebesar 20 persen secara bertahap selama 5 (lima) tahun;



2. meningkatnya kontribusi pariwisata terhadap penyerapan tenaga kerja nasional dari 7,70 juta orang pada tahun 2010 menjadi sebesar 9,20 juta orang pada tahun 2014;
3. meningkatnya kontribusi pariwisata terhadap penerimaan PDB dari 4,80 persen pada tahun 2010 menjadi sebesar 5,25 persen pada tahun 2014;
4. meningkatnya nilai investasi di bidang pariwisata dari sebesar 5,19 persen pada tahun 2010 menjadi sebesar 6,43 persen pada tahun 2014;
5. meningkatnya perolehan devisa dari USD 6,75 miliar pada tahun 2010 menjadi USD 8,95 miliar pada tahun 2014 yang diperoleh dari jumlah kunjungan wisatawan asing; dan
6. meningkatnya pengeluaran wisatawan nusantara dari Rp. 138,00 triliun pada tahun 2010 menjadi sebesar Rp. 207,00 triliun pada tahun 2014.

3.2.4 Peningkatan Daya Beli Masyarakat

Salah satu tantangan yang dihadapi di bidang perekonomian nasional pada masa mendatang adalah menjaga daya beli masyarakat agar tetap meningkat sehingga tetap dapat menjadi penopang pertumbuhan ekonomi. Daya beli masyarakat akan dijaga melalui: (i) peningkatan stabilitas harga; (ii) peningkatan kelancaran arus barang (terutama bahan pokok) untuk menjaga ketersediaan barang; serta (iii) penguatan perdagangan dalam negeri yang berkesinambungan untuk mendorong transaksi perdagangan domestik dan meningkatkan kesempatan berusaha. Untuk itu berbagai permasalahan yang menghambat peningkatan daya beli masyarakat harus dapat diatasi

Beberapa permasalahan pokok yang masih dihadapi terkait dengan peningkatan daya beli masyarakat antara lain adalah sebagai berikut.

Pertama, belum efisien dan efektifnya sistem distribusi nasional yang disebabkan oleh panjangnya rantai distribusi, belum memadainya sarana dan prasarana perdagangan, serta belum tersedianya sistem informasi harga, permintaan dan pasokan barang di tingkat produsen dan konsumen terutama untuk bahan pokok. Selain itu, terbatasnya sarana penyimpanan (pergudangan, silo, dan *cold storage*) di tingkat produksi mengakibatkan terjadinya disparitas harga antarwilayah dan fluktuasi harga di tingkat konsumen.

Kebijakan yang dilakukan pemerintah selama ini dalam mengatasi kelangkaan dan gejolak harga masih bersifat *ad hoc* melalui operasi pasar (OP) yang dirasa kurang efektif dalam mengendalikan kelangkaan dan fluktuasi harga, terutama pada saat hari besar keagamaan, yang merupakan salah satu indikator dari belum optimalnya sistem distribusi komoditas strategis, pokok, dan kebutuhan hajat masyarakat banyak. Upaya tersebut merupakan mekanisme intervensi perdagangan dan distribusi yang parsial sehingga perlu adanya perbaikan dalam sistem perdagangan dan distribusi nasional.

Belum efisiennya sistem distribusi ini memberikan kontribusi terhadap tingginya biaya logistik di Indonesia yang merupakan salah satu faktor penyebab ekonomi biaya tinggi. Berdasarkan survei *Logistic Performance Index* yang dilakukan oleh Bank Dunia (2007), Indonesia menduduki peringkat ke-43, yang berarti lebih rendah dibandingkan Singapura, Malaysia, China, Thailand, dan India, yang masing-masing menduduki peringkat 1, 27, 30, 31, dan 39 (Tabel 3.28). Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi peringkat biaya logistik adalah kepabeanaan, infrastruktur, pengiriman internasional, kompetensi logistik, ketertelusuran, biaya logistik domestik, dan ketepatan waktu.

TABEL 3.28
PERINGKAT INDEKS KINERJA LOGISTIK
TAHUN 2007

Negara	LPI	Kepabeanaan	Infrastruktur	Pengiriman Internasional	Kompetensi Logistik	Ketertelusuran	Biaya Logistik Domestik	Ketepatan Waktu
Singapore	1	3	2	2	2	1	113	1
Malaysia	27	23	28	26	26	28	37	26
China	30	35	30	28	27	31	72	36
Thailand	31	32	31	32	29	36	28	28
India	39	47	42	40	31	42	46	47
Indonesia	43	44	45	44	50	33	92	58
Vietnam	53	37	60	47	56	53	17	65
Philippines	65	53	87	63	70	69	19	70
Cambodia	81	104	81	95	82	81	27	74
Lao PDR	117	120	120	103	106	139	146	102
Myanmar	147	124	145	146	135	149	76	147

Sumber: *Logistic Performance Index (LPI)*, World Bank (2007)

Kedua, masih perlunya upaya penguatan pasar domestik dan peningkatan efisiensi pasar komoditas. Hal ini sangat penting untuk mendorong permintaan domestik terhadap produk dalam negeri, meningkatkan peran UKM dalam perekonomian domestik dan pengembangan produk kreatif, serta mendorong aktivitas perdagangan komoditas berjangka. **Ketiga**, belum optimalnya upaya pengawasan perdagangan dan peningkatan iklim usaha perdagangan. Salah satu penyebabnya adalah masih terbatasnya upaya penataan kelembagaan perdagangan dalam negeri, seperti: perlindungan konsumen, metrologi, pengawasan barang beredar, persaingan usaha, dan komoditas berjangka. **Keempat**, masih belum optimalnya kebijakan dan penataan sarana perdagangan, seperti: pasar induk, pasar ritel (modern dan tradisional), serta pasar di



daerah terpencil dan perbatasan.

Peningkatan daya beli masyarakat dalam 5 (lima) tahun mendatang ditujukan untuk mencapai pertumbuhan konsumsi masyarakat sebesar rata-rata 5,3-5,4 persen. Untuk mendukung tercapainya sasaran ini, upaya yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Menjaga stabilitas harga dengan mengupayakan tingkat inflasi sekitar 4-6 persen per tahun selama tahun 2010-2014;
2. Meningkatkan efisiensi distribusi barang dan jasa, yang ditandai dengan:
 - a. meningkatnya peringkat biaya logistik domestik di Indonesia dari peringkat 92 ke 87;
 - b. menurunnya disparitas harga bahan pokok antar wilayah, yang diukur melalui rasio variasi harga antarprovinsi terhadap variasi harga nasional.
3. Meningkatnya aktifitas perdagangan domestik yang ditandai dengan meningkatnya pertumbuhan PDB riil sub sektor perdagangan besar dan eceran;
4. Meningkatkan efektivitas pengawasan dan iklim usaha perdagangan, yang diukur dengan:
 - a. meningkatnya jumlah penegakan hukum persaingan usaha,
 - b. menurunnya waktu penyelesaian perizinan dan non perizinan di bidang perdagangan dalam negeri, serta
 - c. meningkatnya jumlah perizinan perdagangan dalam negeri yang dilayani secara *online*.

3.2.5 Keuangan Negara

Rentannya stabilitas makro ekonomi terhadap gejolak perekonomian, baik gejolak eksternal maupun internal, masih menjadi permasalahan utama dalam menjaga kesinambungan fiskal. Meskipun secara umum selama periode 2004-2009 pemerintah berhasil mengatasi ancaman krisis ekonomi, masih banyak tantangan yang harus dihadapi pada masa yang datang, baik dari eksternal maupun internal.

Dari sisi eksternal, terdapat 4 (empat) tantangan besar yang harus dihadapi, yaitu: (i) tingginya ketidakpastian ekonomi global, dengan indikasi penurunan volume perdagangan dunia masih berlanjut dan sulitnya mengakses sumber-sumber pendanaan dan investasi; (ii) tingginya volatilitas harga komoditas utama, yang ditandai dengan mulai meningkatnya harga minyak mentah dunia; (iii) integrasi ekonomi global dan regional semakin tinggi, yang mendorong peningkatan daya saing industri; (iv) perubahan arsitektur keuangan dunia, dengan semakin pesatnya perkembangan instrumen pembiayaan dan investasi sehingga memerlukan aturan baru dengan tingkat pengawasan yang lebih mendalam. Di sisi internal ketidakpastian juga terlihat dari

adanya gejolak di pasar saham dan keuangan, belum Bergeraknya sektor riil secara optimal, dan musibah bencana alam yang melanda berbagai daerah di Indonesia. Kesemuanya ini menjadi tantangan ke depan dalam peningkatan kualitas pengelolaan kebijakan fiskal.

Sementara itu, dari sisi domestik, salah satu tantangan terberat berasal dari masih tingginya tingkat pengangguran dan angka kemiskinan di Indonesia. Tantangan lainnya berasal dari kondisi infrastruktur yang masih belum memadai untuk menunjang akselerasi pembangunan. Pelaksanaan program mitigasi dampak krisis global melalui paket stimulus fiskal yang mencapai Rp73,3 triliun di tahun 2009 dirasakan masih lambat dan belum optimal. Oleh karena itu, sebagai pembelajaran, ke depan harus segera dilakukan langkah-langkah perbaikan melalui koordinasi yang intensif dan komprehensif antar-lembaga negara atau instansi pemerintah.

Langkah antisipatif dan responsif dalam mencermati tantangan-tantangan di atas, akan dapat mengeleminasi berbagai permasalahan, gangguan, dan hambatan dalam pembangunan ekonomi sedini mungkin. Dengan demikian, diharapkan dapat memberikan hasil pada peningkatan pertumbuhan ekonomi yang semakin tinggi. Dengan tingginya tingkat pertumbuhan ekonomi, masalah pengangguran dan kemiskinan dapat segera diatasi serta peningkatan kesejahteraan rakyat dapat segera terwujud.

Permasalahan lain yang muncul di bidang keuangan negara adalah yang terkait dengan pelaksanaan sistem pengelolaan anggaran yang masih belum optimal sebagaimana yang diamanatkan dalam UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mencakup pelaksanaan anggaran terpadu (*unified budget*), penerapan sistem penganggaran berbasis kinerja (*performance based budget*), dan penerapan alokasi belanja negara dalam kerangka pengeluaran jangka menengah (*medium term expenditure framework*). Selain itu, sistem pelaksanaan anggaran serta penyusunan laporan keuangan pemerintah (termasuk neraca laporan keuangan pemerintah) yang masih perlu ditingkatkan juga merupakan masalah yang saat ini dan ke depan masih akan dihadapi bidang keuangan negara.

Secara spesifik, permasalahan dan tantangan yang dihadapi bidang keuangan negara dapat dibagi berdasarkan fungsi-fungsi sebagai berikut:



1. Pendapatan Negara

Pendapatan negara bersumber dari penerimaan perpajakan, penerimaan bea dan cukai, serta Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Dari sisi penerimaan perpajakan, salah satu permasalahan yang dihadapi adalah realisasi penerimaan yang masih di bawah potensi penerimaannya sehingga *coverage ratio*-nya masih rendah. Kondisi ini disebabkan oleh (1) belum optimalnya kualitas pelayanan perpajakan secara merata di seluruh wilayah Indonesia; (2) belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung pelayanan dan peningkatan kepatuhan wajib pajak; serta (3) masih rendahnya kualitas SDM yang memenuhi harapan organisasi dan masyarakat.

Di bidang kepabeanan dan cukai permasalahan utama yang dihadapi adalah (1) belum optimalnya sistem dan prosedur pelayanan kepabeanan dan cukai; (2) belum efektifnya sistem pengawasan kepabeanan dan cukai; serta (3) belum memadainya sarana dan prasarana dalam rangka mendukung sistem pelayanan dan pengawasan kepabeanan dan cukai. Sementara itu, di bidang PNBP permasalahan utama yang masih dihadapi ke depan adalah (1) adanya kecenderungan penurunan produksi minyak bumi yang disebabkan, terutama, oleh faktor alam dan rendahnya investasi baru migas; (2) masih tingginya kegiatan pembalakan liar (*illegal logging*) yang mengakibatkan penurunan potensi PNBP kehutanan; serta (3) masih tingginya risiko tidak tercapainya penerimaan atas laba BUMN, terutama karena faktor kinerja BUMN dan makroekonomi;

2. Belanja Negara

Dari sisi belanja negara, permasalahan utama yang dihadapi adalah (1) terbatasnya ruang gerak fiskal yang disebabkan oleh komposisi dan struktur belanja negara yang tidak sehat, di antaranya alokasi belanja wajib meliputi belanja pegawai, subsidi, dan pembayaran bunga utang lebih besar jika dibandingkan dengan belanja untuk investasi; (2) belum optimalnya pelaksanaan sistem pengelolaan belanja negara, seperti yang diamanatkan dalam UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang diantaranya meliputi sistem penganggaran terpadu (*unified budget*), anggaran berbasis kinerja (*performance based budgeting*), dan kerangka pengeluaran dalam jangka menengah (*medium term expenditure framework*); serta (3) masih rendahnya efektivitas dan efisiensi pengeluaran negara sebagai dampak dari (a) belum sinkronnya dana desentralisasi dengan dana dekonsentrasi dan dana tugas pembantuan, terutama dalam hal akuntabilitas pengelolaannya; dan (b) belum adanya sinergi antara program nasional dan kebijakan di daerah menjadikan pengeluaran APBD dan pengeluaran APBN untuk daerah tidak efektif.

3. Pembiayaan APBN

Pembiayaan APBN bersumber dari dalam dan luar negeri. Beberapa permasalahan utama di bidang pembiayaan APBN dalam negeri adalah (1) belum optimalnya pengelolaan portofolio Surat Berharga Negara (SBN); (2) belum optimalnya pasar dan infrastruktur SBN; serta (3) masih lemahnya koordinasi pengelolaan SBN. Sementara itu, permasalahan utama yang dihadapi dalam pembiayaan luar negeri adalah (1) tingginya beban pembayaran cicilan pokok utang dan bunga utang pemerintah; serta (2) belum optimalnya efisiensi dan efektivitas pemanfaatan utang luar negeri yang berdampak terhadap meningkatnya beban *commitment fee* akibat dari keterlambatan pemenuhan persyaratan pemberi pinjaman (*lender*), khususnya pada utang baru.

4. Perbendaharaan Negara

Beberapa permasalahan yang perlu mendapat perhatian ke depan di bidang perbendaharaan negara adalah (1) penyiapan berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perbendaharaan; (2) masih terdapat rekening pemerintah di berbagai kementerian negara/lembaga yang keberadaannya tidak mencerminkan praktik yang sehat dalam pengelolaan keuangan negara; (3) pelaksanaan pengelolaan kas (*cash management*) yang belum dapat dilaksanakan secara optimal, khususnya terkait dengan pelaksanaan kas (*cash forecasting*) dan pemanfaatan dana pemerintah yang menganggur (*idle cash*); (4) masih terdapat BUMN/BUMD serta pemerintah daerah yang kesulitan melunasi kewajibannya kepada pemerintah pusat atas pemberian penerusan pinjaman yang dananya bersumber dari penerusan pinjaman/SLA, Rekening Dana Investasi/RDI dan rekening pembangunan daerah; serta (5) peningkatan efisiensi belanja barang/jasa pemerintah.

5. Kekayaan Negara

Beberapa permasalahan utama yang dihadapi dalam pengelolaan barang milik negara adalah sebagai berikut: (1) belum tersedianya peraturan perundang-undangan secara lengkap terkait dengan pengelolaan kekayaan negara, termasuk penatausahaan kekayaan negara yang dipisahkan pada BUMN dan BHMN; (2) belum optimalnya pengamanan Barang Milik Negara (BMN), baik secara administratif, hukum, dan fisik; (3) belum optimalnya pemanfaatan BMN sesuai prinsip *The Highest and Best Use*; serta (4) masih lemahnya koordinasi antara kementerian dan lembaga terkait dengan penilaian barang milik negara;

6. Pengelolaan dan Pembinaan BUMN

Terkait dengan BUMN, permasalahan dan tantangan dalam pembinaan dan pengawasannya adalah sebagai berikut: (a) masih terdapatnya ketidakharmonisan peraturan perundang-undangan yang menyebabkan penafsiran yang berpengaruh terhadap kepastian hukum di bidang pengurusan, pengawasan, dan pembinaan BUMN; (b) kondisi ekonomi baik nasional, regional, maupun global yang sedang dalam tahap pemulihan; (c) persaingan usaha yang makin ketat; (d)



pelaksanaan otonomi daerah yang sering tidak kondusif bagi pengembangan usaha; serta (e) pelaksanaan tata kelola yang baik (*good governance*).

Bertolak dari berbagai permasalahan yang ada, sasaran sektor keuangan negara pada 2010—2014 adalah sebagai berikut: (1) menciptakan dan memantapkan stabilitas ekonomi terhadap kemungkinan timbulnya gejolak ekonomi, baik yang berasal dari luar maupun dari dalam negeri; (2) mengatasi ancaman kesinambungan fiskal; (3) meningkatkan optimalisasi pemanfaatan belanja negara; (4) meningkatkan daya guna dan hasil guna pengelolaan kekayaan negara, serta optimalisasi pengamanan BMN, baik secara administrasi, hukum, maupun fisik.

Sementara itu, spesifik untuk pengelolaan dan pembinaan BUMN, dengan berbagai tantangan yang dihadapi, sasaran pembangunan dalam pembinaan BUMN adalah sebagai berikut: (1) meningkatnya kapasitas dan kemampuan pembinaan BUMN; (2) terwujudnya penerapan *best practices* GCG dan sistem penilaian kinerja; (3) meningkatnya peran BUMN dalam pengelolaan SDA strategis dan pertahanan nasional; (4) meningkatnya keuntungan BUMN; (5) meningkatnya peran BUMN untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional; (6) meningkatnya kualitas pelaksanaan penugasan pemerintah untuk pelayanan umum; (7) meningkatnya peran BUMN dalam keperintisan usaha dan pengembangan UMKM; (8) terwujudnya sistem pengelolaan BUMN yang semakin sehat dan kompetitif; (9) meningkatnya peran BUMN dalam percepatan pelaksanaan prioritas pembangunan nasional.

3.2.6 Moneter

Dari sisi eksternal tantangan yang akan dihadapi dalam menjaga stabilitas moneter selama kurun waktu 2010–2014 antara lain adalah sebagai berikut.

1. Semakin meningkatnya ketidakpastian di dalam dinamika ekonomi global seperti perkembangan pasokan/produksi dan harga komoditas (termasuk BBM dan bahan pangan pokok) di pasar dunia, tindakan ekstrimisme/terorisme, dan nilai tukar mata uang penting di dunia sulit diprediksi sehingga berpotensi menimbulkan kejutan (*shock*) dan gejolak (*volatility*) di pasar modal/uang dan komoditas yang pada gilirannya dapat menekan pelemahan nilai tukar Rupiah dan mendorong inflasi.
2. Relatif tingginya inflasi dibandingkan dengan negara-negara sekawasan mendorong pelemahan nilai tukar Rupiah, menghambat penurunan suku bunga perbankan dan mengurangi daya saing produk barang dan jasa di pasaran internasional.
3. Berlangsungnya proses pemulihan dari krisis keuangan global akan meningkatkan permintaan agregat dunia dan berpotensi kembali mendorong kenaikan harga komoditas di pasar dunia, termasuk bahan bakar minyak (BBM)

dan bahan pangan pokok seperti beras, kedelai, gandum/terigu, gula, minyak sawit mentah (*crude palm oil – CPO*) dan jagung.

4. Dampak perubahan iklim global (*global climate change*), seperti kekeringan dan banjir adalah dampak fenomena cuaca El Nino dan La Nina yang bisa mengganggu produksi/ pasokan bahan pangan pokok sehingga berpotensi memicu inflasi.
5. Fleksibilitas nilai tukar sebagai salah satu syarat penerapan kerangka kerja pencapaian sasaran inflasi (*Inflation Targeting Framework-ITF*) terkadang mendorong gejolak nilai tukar rupiah dalam sistem devisa bebas memberikan tekanan kenaikan inflasi serta dapat mempengaruhi kestabilan sektor keuangan.

Sementara itu, di dalam negeri tantangan yang dihadapi, terutama disebabkan oleh masalah struktural antara lain sebagai berikut:

1. Formasi dan besarnya wilayah Indonesia secara geografis, yaitu berupa negara kepulauan yang membentang luas sehingga mempengaruhi kelancaran arus perdagangan barang/jasa dalam negeri, termasuk bahan pangan pokok;
2. Belum memadainya dukungan infrastruktur seperti jalan, jembatan, listrik, pelabuhan/ bandara, dan sarana perhubungan dapat mempengaruhi pasokan dan distribusi barang/jasa sehingga berpotensi untuk memicu kenaikan harga;
3. Kapasitas dan sebaran geografis pusat-pusat produksi/pasokan barang/jasa beserta sistem jaringan distribusinya dapat menimbulkan ketidakmerataan dan ketidak-lancaran pasokan sehingga berpotensi mendorong kenaikan harga;
4. Faktor lingkungan/ kelembagaan usaha yang kurang kondusif dapat menciptakan ekonomi biaya tinggi antara lain disebabkan oleh belum optimalnya layanan birokrasi pemerintah, banyaknya pungutan/retribusi baik di tingkat pusat maupun daerah (provinsi dan kabupaten/kota), dan ketidakpastian hukum dapat menciptakan ekonomi biaya tinggi; serta
5. Masih tingginya ekspektasi inflasi dari dunia usaha dan masyarakat membuat jalur utama peningkatan pendapatan dan keuntungan dilakukan melalui kenaikan harga. Peningkatan skala produksi, tingkat efisiensi, produktivitas, dan kualitas barang dan jasa merupakan sumber utama peningkatan pendapatan dan keuntungan di negara-negara yang lebih maju.

Untuk menjawab berbagai masalah dan tantangan di atas, sasaran di bidang moneter yang akan dicapai dalam tahun 2010-2014 adalah sebagai berikut.

1. Stabilitas ekonomi makro yang dapat mendukung tercapainya pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan berkualitas serta peningkatan kemampuan pendanaan pembangunan baik yang bersumber dari pemerintah maupun swasta dengan tetap menjaga stabilitas nasional terpelihara;



2. Terpelihara tingkat inflasi yang cukup rendah sekitar 4-6 persen per tahun selama tahun 2010 – 2014 terpelihara. Dengan terjaganya inflasi pada tingkat yang rendah tersebut, nilai tukar rupiah akan cukup mantap dan stabil, dan suku bunga perbankan dapat terpelihara pada tingkat yang rendah/kondusif, dan mendorong pertumbuhan ekonomi;
3. Inflasi yang rendah selama tahun 2010-2014, yang didukung oleh partisipasi aktif masyarakat di daerah melalui terbentuknya tim pemantauan dan pengendalian inflasi di seluruh provinsi, tercapainya pusat-pusat produksi dan distribusi yang terkoneksi dengan efisien di daerahnya, serta koordinasi dan komunikasi yang efektif antara Pemerintah, BI, dunia usaha dan masyarakat tercipta.

3.2.7 Sektor Keuangan

Terjaganya stabilitas ekonomi berdampak pada stabilnya kondisi sektor keuangan. Meskipun ketahanan sektor keuangan relatif terjaga, namun-masih terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi. Permasalahan tersebut di antaranya adalah sebagai berikut.

Pertama, fungsi intermediasi perbankan masih terkendala. Meskipun *loan to deposit ratio* (LDR) memiliki kecenderungan meningkat dari tahun ke tahun, sebagian besar merupakan kredit modal kerja dan kredit konsumsi. Rendahnya komposisi kredit investasi tidak terlepas dari struktur simpanan pada perbankan yang merupakan dana jangka pendek yang berjangka waktu 1 sampai dengan 3 bulan sehingga berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian di dalam pendanaan yang bersifat jangka panjang (Tabel 3.29).

Di samping itu, besarnya selisih (*spread*) antara suku bunga kredit dan simpanan diperkirakan menjadi salah satu penyebab rendahnya penyaluran kredit investasi oleh industri perbankan. Oleh karena itu salah satu sasaran yang ingin dicapai kedepan adalah meningkatnya efisiensi perbankan serta berkembangnya sumber pembiayaan lain yang berasal dari lembaga keuangan bukan bank sehingga diharapkan selisih antara tingkat suku bunga kredit dan simpanan dapat ditekan.

TABEL 3.29
KOMPOSISI SIMPANAN DEPOSITO MENURUT JANGKA WAKTU
TAHUN 2004-2009
(Rp Miliar)

Komponen	2004	2005	2006	2007	2008	2009*)
Deposito 1 bulan	247.864	351.653	340.908	389.489	459.872	433.751
<i>pangsa (persen)</i>	<i>58,8</i>	<i>61,7</i>	<i>54,6</i>	<i>57,1</i>	<i>54,5</i>	<i>50,6</i>
Deposito 3 bulan	47.749	61.357	80.580	75.366	98.540	141.726
<i>pangsa (persen)</i>	<i>11,3</i>	<i>10,8</i>	<i>12,9</i>	<i>11,1</i>	<i>11,7</i>	<i>16,5</i>
Lain-lain	125.678	156.669	203.101	216.674	285.454	282.164
<i>pangsa (persen)</i>	<i>29,8</i>	<i>27,5</i>	<i>32,5</i>	<i>31,8</i>	<i>33,8</i>	<i>32,9</i>
Total	421.291	569.679	624.589	681.529	843.866	857.641
<i>pangsa (persen)</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>

Sumber : Statistik Ekonomi dan Keuangan Indonesia (SEKI), Bank Indonesia
 *) sampai dengan September 2009

Kedua, terdapat potensi tekanan krisis sebagai dampak belum pulihnya kondisi likuiditas serta semakin beragam dan canggihnya produk-produk sektor keuangan. Maraknya produk derivatif dari sektor keuangan menuntut otoritas pengawas sektor keuangan untuk dapat mengantisipasi terjadinya risiko sistemik pada sistem keuangan agar tidak terjadi krisis atau dapat mengelola krisis apabila telah terjadi. Untuk itu, sinkronisasi kebijakan antarotoritas pengawas jasa keuangan sangat diperlukan. Diharapkan ke depan Jaring Pengaman Sistem Keuangan sudah mulai dapat diimplementasikan guna memperkuat ketahanan sistem keuangan domestik.

Ketiga, perbankan berbasis syariah meskipun berkembang pesat, perannya dalam perbankan nasional relatif masih terbatas. Tantangan ke depan adalah meningkatkan peran tersebut, dengan tetap menjaga kesehatan perbankan syariah. Dalam kaitan ini, perlu dicermati pola masyarakat yang cenderung memilih bentuk keuntungan yang telah disepakati terlebih dahulu (*revenue sharing*) jika dibandingkan dengan keuntungan yang berdasarkan laba rugi (*profit loss sharing*). Hal ini berpotensi meningkatkan risiko di dalam pengelolaan bank syariah. Diharapkan dalam jangka menengah produk-produk syariah dapat berkembang dan memiliki variasi yang luas untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam setiap industri, termasuk skema bagi hasil dan pembiayaan ke UMKM.

Keempat, peran lembaga jasa keuangan bukan bank (LKBB) masih belum signifikan untuk dapat menjadi sumber pendanaan jangka panjang. Total aset yang terhimpun melalui asuransi, dana pensiun, perusahaan pembiayaan, perusahaan modal



ventura dan pegadaian baru sekitar 10,2 persen dari PDB jika dibandingkan dengan perbankan yang telah mencapai sekitar 47,3 persen dari PDB tahun 2008. Sementara pasar modal sebagai penggerak dana jangka panjang bagi sektor swasta masih perlu ditingkatkan. Untuk itu beberapa hal yang perlu dikembangkan, antara lain adalah peningkatan peran pasar modal syariah, peningkatan efisiensi pelaku pasar melalui restrukturisasi perusahaan efek, serta transparansi informasi dan penerapan prinsip kehati-hatian untuk meningkatkan keamanan berinvestasi di pasar modal dalam negeri.

Kelima, di sisi pembiayaan mikro, kinerja Bank Perkreditan Rakyat (BPR) juga menunjukkan kinerja yang membaik. Keunggulan BPR dibandingkan dengan Bank Umum adalah pelayanan kepada UMKM dan masyarakat berpenghasilan rendah dengan mengedepankan kedekatan dengan nasabah melalui pelayanan langsung (*door to door*) dan pendekatan secara personal memperhatikan budaya setempat. Namun, mengingat minimnya informasi tentang usaha yang dimiliki nasabah, terdapat kecenderungan bahwa BPR lebih fokus kepada nasabah yang *bankable*. Di sisi lembaga pembiayaan mikro yang berbentuk bukan bank bukan koperasi (B3K) masih terkendala di dalam hal aspek legalitas, pengaturan, pengawasan dan infrastruktur yang mendukung, antara lain keberadaan Apex Bank dan asuransi mikro.

Keenam, semakin terintegrasinya sistem keuangan Indonesia dengan sistem keuangan dunia menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara yang berkedudukan sebagai target investasi ataupun aliran dana dari berbagai belahan dunia. Hal ini mengakibatkan sistem keuangan Indonesia menjadi rentan terhadap masuknya dana asing (*capital inflow*) yang terkait dengan aktivitas melawan hukum ataupun keluarnya dana (*capital outflow*) dari dalam negeri yang diperoleh secara melawan hukum. Selain itu, maraknya kejahatan keuangan di Indonesia sebagai akibat penyalahgunaan kewenangan oleh para pemilik usaha ataupun pelaku-pelaku ekonomi itu sendiri secara sistematis dan tersembunyi mengakibatkan sulit dideteksi secara dini dalam rangka melakukan pencegahan segera (*preventive action*) sehingga dampak yang ditimbulkan dapat menjadi sangat besar dan membahayakan sistem keuangan secara keseluruhan. Hal ini secara langsung berdampak terhadap semakin maraknya modus-modus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang lebih canggih sehingga dibutuhkan upaya pengungkapan kejahatan keuangan dalam hal penelusuran aliran dana ataupun harta kekayaan dalam kaitannya dengan TPPU yang dilakukan oleh pelaku kejahatan tersebut. Selain berbagai upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah hingga saat ini, dalam rangka pencegahan dan pemberantasan TPPU dan pendanaan teroris semakin kompleks dan meningkat. Hal yang sangat mendesak adalah perubahan atas UU TPPU yang saat ini oleh pemerintah telah disampaikan ke DPR RI.

3.2.8 Industri

Permasalahan yang dihadapi sektor industri dapat dikelompokkan atas permasalahan yang berada di luar sektor industri (masalah eksternal) dan permasalahan yang ada dalam sektor itu sendiri (masalah internal). Masalah eksternal

industri mencakup (1) ketersediaan dan kualitas infrastruktur (jaringan jalan, pelabuhan, kereta api, listrik, pasokan gas) yang belum memadai, (2) pengawasan barang-barang impor yang belum mampu menghentikan peredaran barang impor illegal di pasar domestik, (3) hubungan industrial dalam perburuhan belum terbangun dengan baik, (4) masalah kepastian hukum, dan (5) suku bunga perbankan yang masih tinggi. Penyelesaian masalah ini berada di luar kewenangan departemen perindustrian sehingga tantangannya adalah memprakarsai penyelesaiannya dengan berkoordinasi dengan kementerian/lembaga yang berwenang.

Permasalahan internal industri secara umum dapat dikelompokkan dalam tiga hal. Pertama adalah populasi usaha industri, baik dalam hal postur maupun jumlah yang masih lemah. Data statistik industri besar dan sedang dan statistik industri kecil dan rumah tangga (IKR) tahun 2005 menunjukkan bahwa jumlah industri berskala besar berjumlah 6.599 perusahaan, sedang 14.130, kecil 230.247, dan industri rumah tangga berjumlah 2.323.772 perusahaan sehingga total jumlah usaha industri pada tahun 2005 adalah 2.574.748. Hal ini berarti jumlah perusahaan yang berukuran besar dan sedang hanya 20.729 atau hanya sekitar 0,1 persen dari populasi industri. Untuk memperbesar lapangan kerja yang mapan dan lebih stabil, jumlah industri besar dan sedang perlu ditingkatkan.

Permasalahan kedua adalah struktur industri nasional yang belum kokoh baik bila dilihat dari (1) penguasaan usaha; (2) keterkaitan industri skala besar dan industri kecil dan menengah (IKM); dan (3) keterkaitan hulu-hilir.

1. Data rasio konsentrasi industri dua perusahaan (CR2) tahun 2006 menunjukkan bahwa dari 45 komoditas industri, 27 di antaranya memiliki angka CR2 lebih besar dari pada 50 (Statistik Industri, BPS tahun 2006). Artinya dua perusahaan terbesar menguasai lebih dari 50 persen dari pasar domestik. Kondisi ini menunjukkan bahwa struktur industri dalam hal penguasaan usaha belum sehat.
2. Tantangan pembangunan yang berkaitan dengan permasalahan ini adalah kebijakan pada saat pemberian izin investasi dengan memperhatikan kapasitas penyerapan pasar sehingga tidak menimbulkan *entry barrier* yang sangat besar dan pada saat yang sama tidak menciptakan kondisi konsolidasi saling mematikan karena *over supply*. Tantangan selanjutnya adalah meningkatkan jumlah perusahaan industri pada komoditas yang memiliki konsentrasi pasar yang tinggi.
3. Industri kecil dan menengah di Indonesia belum banyak terkait dengan industri besar yang lebih hilir, atau belum banyak yang bertindak sebagai pemasok bahan baku/bahan setengah jadi atau pemasok jasa bagi industri besar (*original equipment manufacturer/OEM*). Studi terakhir menunjukkan bahwa industri otomotif dalam negeri baru memiliki dua lapis jaringan pemasok (tier 2). Bila dibandingkan dengan negara maju yang dapat mencapai 12 lapis, dapat

dikatakan bahwa struktur industri dalam hal skala usaha masih lemah belum terbangun dengan baik.

4. Tantangan untuk membangun keterkaitan IKM–OEM ada tiga kategori utama yakni (1) peningkatan kemampuan IKM agar mampu memenuhi kebutuhan OEM, baik dalam hal harga, mutu produk, maupun ketepatan penyerahan; (2) dukungan sarana jaringan pengukuran, standardisasi, pengujian dan kualitas (MSTQ) di seluruh sektor industri yang berpotensi memiliki jaringan pemasok yang luas; serta (3) fasilitasi hubungan antara OEM dan calon pemasok dari IKM yang secara umum untuk menurunkan biaya transaksi, yaitu biaya untuk pencarian (*search cost*), biaya negosiasi dan pengikatan kontrak, serta biaya penegakan kontrak. Tantangan ketiga ini membutuhkan pihak ketiga dengan kompetensi sebagai *match maker* yang masih perlu dibangun.
5. Struktur industri hulu-hilir nasional masih lemah. Salah satu indikator untuk menunjukkan hal ini adalah nilai impor bahan baku/bahan penolong untuk industri. Data Statistik Industri 2006 yang dipublikasikan tahun 2009 menunjukkan bahwa impor bahan baku industri cukup tinggi terutama untuk industri andalan (yang menyerap banyak tenaga kerja dan produknya banyak dikespor) seperti industri alat angkut, elektronika, tekstil, dan industri berbasis kimia. Sebagai contoh, industri motor listrik, dari Rp796 miliar untuk keseluruhan bahan baku yang diimpor mencapai nilai Rp407 miliar (Rp289 miliar di antaranya adalah bahan magnet). Data lain menunjukkan bahwa ekspor bahan mentah kita (hasil ekstraksi sumber alam dan hasil pertanian) sangat tinggi sehingga tantangan untuk memperkuat struktur hulu-hilir tersebut adalah menumbuhkan industri komponen atau pengolah sumber alam menjadi material industri atau barang setengah jadi.

Permasalahan ketiga adalah produktivitas, yaitu besarnya nilai tambah yang diciptakan oleh setiap tenaga kerja di industri yang bersangkutan yang masih rendah. Statistik industri tahun 2006 menunjukkan bahwa dari 66 kelompok industri berskala sedang dan besar, hanya lima belas kelompok yang memiliki nilai produktivitas di atas Rp200 juta/orang dan hanya dua kelompok yang bernilai di atas Rp1 miliar, yaitu industri migas dan industri kendaraan roda empat. Tantangan pembangunan yang terkait dengan permasalahan ini adalah dilakukan sebagai berikut.

1. Peningkatan efisiensi usaha melalui perbaikan metode kerja, peningkatan disiplin dan etos kerja, peningkatan kualitas pengelolaan usaha, serta revitalisasi dan restrukturisasi usaha.
2. Peningkatan nilai tambah produk industri melalui inovasi, baik produk maupun proses industri. Untuk menjawab tantangan ini perlu dibangun hubungan yang sinergi antara lembaga penelitian/perguruan tinggi dengan dunia industri. Kebijakan industri nasional yang memberikan fasilitasi kepada industri yang melakukan pengembangan teknologi perlu diwujudkan.

Sasaran pembangunan industri untuk tahun 2010-2014 adalah rata-rata pertumbuhan industri pengolahan mencapai 5,5-6,0 persen dan khusus untuk industri pengolahan nonmigas adalah 6,1-6,7 persen. Rincian sasaran pertumbuhan untuk tiap-tiap subsektor industri ditampilkan dalam Tabel 3.30.

TABEL 3.30
SASARAN JANGKA MENENGAH PERTUMBUHAN INDUSTRI
TAHUN 2010-2014

Cabang Industri	Realisasi	Prediksi	Sasaran				
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
INDUSTRI PENGOLAHAN	3,7	1,4	4,2-4,3	5,0-5,4	5,7-6,5	6,2-6,8	6,5-7,3
Industri Pengolahan Non Migas	4,1	1,7	4,8-4,9	5,6-6,1	6,3-7,0	6,8-7,5	7,1-7,8
1. Makanan, Minuman, Tembakau	2,34	10,0	6,0-6,0	6,5-7,0	7,5-8,3	8,3-8,8	8,3-9,0
2. Tekstil, Brg. Kulit dan Alas Kaki	-3,64	-2,0	2,0-2,3	3,0-3,8	3,5-4,0	3,5-4,8	3,8-5,8
3. Brg. Kayu dan Hasil Hutan	3,45	-1,5	1,5-2,0	2,5-3,0	2,5-3,0	2,5-3,0	2,5-3,0
4. Kertas dan Barang Cetak	-1,48	4,5	4,5-4,5	5,0-5,0	5,0-5,0	5,0-5,0	5,0-5,0
5. Pupuk, Kimia dan Barang Karet	4,46	0,9	5,0-5,0	5,0-6,0	5,0-6,5	5,0-6,8	6,0-7,0
6. Semen, Brg. Galian Non Logam	-1,49	-3,0	3,0-3,5	3,0-4,0	4,0-4,3	4,5-4,8	5,8-6,3
7. Logam Dasar Besi dan Baja	-2,05	-4,5	2,5-3,0	3,0-3,0	4,0-4,5	4,3-5,0	4,3-5,5
8. Alat Angkut, Mesin, Peralatan	9,79	-2,6	5,0-5,5	6,5-7,0	7,0-8,0	8,0-8,5	8,3-8,5
9. Barang Lainnya	-0,96	4,0	5,0-5,5	5,5-5,8	6,0-6,3	6,5-6,8	7,0-8,0

3.2.9 Ketenagakerjaan

Perkembangan pasar kerja dalam lima tahun terakhir sudah mulai membaik meskipun masih dihadapkan pada berbagai permasalahan. Pasar kerja Indonesia yang masih dualistik, di satu sisi pekerja formal hanya sekitar 30 persen dan pekerja informal sekitar 70 persen, disertai kualitas angkatan kerja yang masih sangat rendah. Beberapa masalah dan tantangan yang dihadapi antara lain adalah sebagai berikut.

Terbatasnya Kesempatan untuk Memperoleh Pekerjaan yang baik (*decent work*). Kondisi pasar kerja dicerminkan oleh angka penganggur usia muda dan TPT untuk lulusan pendidikan SMA ke atas masih tinggi. Di sisi lain, kegiatan ekonomi informal dengan pekerja yang juga informal masih besar yaitu 69,1 persen tahun 2009. Para



penganggur ini membutuhkan pekerjaan yang baik (*decent work*), lapangan kerja produktif, hak-hak pekerja terlindungi, adanya perlindungan sosial yang memadai yang umumnya pada kegiatan ekonomi formal. Kegiatan ekonomi formal yang biasanya ditandai dengan upah rata-rata lebih tinggi dan kondisi kerja yang lebih baik jika dibandingkan dengan upah yang diperoleh pekerja informal, masih belum dapat menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang besar. Pekerja formal memiliki kesempatan untuk memperoleh keterampilan dan akses terhadap pelatihan yang dapat menempatkan mereka pada posisi lebih baik untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan mereka. Sebaliknya, kebanyakan pekerja informal (walaupun tidak semuanya) melakukan kegiatan yang rendah tingkat produktivitasnya dengan upah rendah serta tidak menentu. Keterbatasan lapangan kerja formal, menyebabkan pekerja merasa kurang mempunyai jaminan kerja untuk jangka menengah. Prospek (peluang) yang mereka miliki untuk mendapatkan penghasilan yang memadai juga berkurang. Hal ini menjadi tantangan yang besar karena jumlah pencari kerja baru yang memasuki pasar tenaga kerja dalam kurun waktu lima tahun mendatang diperkirakan akan terus meningkat. Kondisi ini menyiratkan bahwa pembangunan ekonomi difokuskan pada kualitas pertumbuhan ekonomi yang mempunyai basis yang luas meliputi semua lapisan masyarakat.

Kualitas angkatan kerja yang rendah dan TPT usia muda yang tinggi. Struktur pekerja yang lulus SD dan SLTP sebesar 71,14 persen. Kondisi seperti ini menyebabkan kualitas pekerja tidak sebaik mereka yang lulus SMTA dan perguruan tinggi yang besarnya hanya 28,86 persen. Ketersediaan lembaga pelatihan untuk meningkatkan kualitas pekerja masih belum memadai, diikuti dengan rendahnya kompetensi tenaga kerja, dan juga sertifikasi kompetensi hingga saat ini belum banyak diakui oleh pengguna kerja. Kondisi ini turut memberikan kontribusi terhadap produktivitas pekerja yang rendah jika dibandingkan dengan negara-negara di ASEAN.

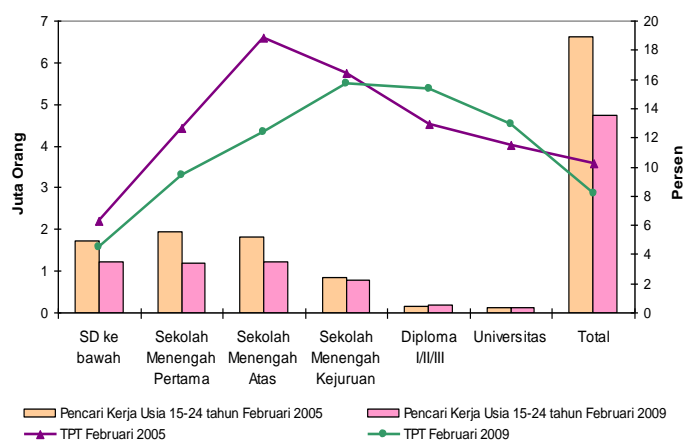
TABEL 3.31
PENDUDUK USIA 15 TAHUN KE ATAS YANG BEKERJA
MENURUT PENDIDIKAN TERTINGGI YANG DITAMATKAN

Pendidikan yang Ditamatkan	Bekerja		Bekerja		Tingkat Pengangguran		Pencari Kerja Usia 15—24 tahun (juta)		
	2005		2009		Terbuka (TPT dalam %)		2005	2009	Perubahan 2005—2009
	Nopember	%	Agustus	%	Nop 2005	Ags 2009	Februari	Februari	
SD ke bawah	52,06	55,4	55,21	52,8	6,58	3,78	1,72	1,21	-0,51
Sekolah Menengah Pertama	19,13	20,4	19,39	18,5	14,15	8,37	1,96	1,20	-0,76
Sekolah Menengah Umum	11,98	12,7	14,58	13,9	20,40	14,50	1,81	1,23	-0,58
Sekolah Menengah Kejuruan	5,60	6,0	8,24	7,9	18,92	14,59	0,84	0,79	-0,05
Diploma I/II/III	2,19	2,3	2,79	2,7	12,34	13,66	0,17	0,18	0,01
Universitas	3,00	3,2	4,66	4,4	11,64	13,08	0,11	0,12	0,01
Total	93,96	100	104,87	100	11,24	7,87	6,61	4,73	-1,88

Sumber: Diolah dari data Sakernas Agustus 2005 dan 2009-BPS

GAMBAR 3.5
PENCARI KERJA USIA 15-24 TAHUN, FEBRUARI 2005
DAN FEBRUARI 2009

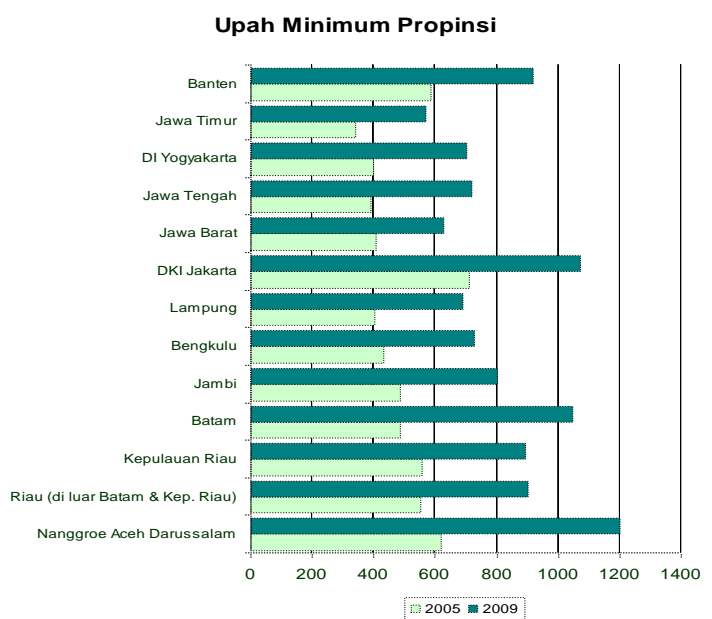
Meningkatnya persentase lulusan SMU dan kejuruan, yaitu dari 18,7 persen menjadi 21,8 persen dan lulusan diploma dan universitas sebesar 5,5 persen di tahun 2005 menjadi 7,1 persen di tahun 2009, belum dapat mendorong peningkatan produktivitas pekerja secara berarti. Tingginya TPT usia muda dan masih besarnya angkatan kerja yang berpendidikan rendah menjadi kendala dalam meningkatkan daya saing dan posisi tawar angkatan kerja. Tingginya TPT usia muda dan masih besarnya angkatan kerja yang berpendidikan rendah merupakan tantangan yang dihadapi dalam rangka meningkatkan daya saing dan posisi tawar angkatan kerja.



Kesenjangan Upah di antara kelompok Pekerja. Pergerakan upah di Indonesia, lebih banyak ditentukan oleh aspek kenaikan tingkat harga dibandingkan dengan kenaikan produktivitas. Produktivitas belum menjadi determinan utama dalam penentuan upah. Sebaiknya, komponen penentuan Upah Minimum Regional (UMR) tidak hanya melihat pada sisi kenaikan inflasi saja, tetapi perlu diimbangi dengan aspek produktivitas dan pencapaian target pekerjaan.

GAMBAR 3.6
UPAH MINIMUM PROVINSI DI BEBERAPA PROVINSI

Tiap-tiap daerah memiliki tingkat upah yang tidak sama, seperti Banten dan Jawa Tengah, dimana upah di Provinsi Banten lebih tinggi. Perbedaan tingkat upah yang cukup besar antara Banten dan Jawa Tengah dalam jangka menengah dan panjang akan merugikan posisi Banten. Terdapat indikasi adanya relokasi industri ke Provinsi Jawa Tengah, terutama industri yang tergolong padat tenaga kerja. Perbedaan rata-rata upah yang cukup besar juga dialami oleh usaha mikro dan kecil dengan usaha menengah dan besar, yaitu sebesar Rp603 ribu banding Rp2.040 ribu per bulan. Menjadi tantangan ke depan adalah mengupayakan agar upah minimum meningkat sebesar peningkatan inflasi dan mendorong upah individu melalui hasil negosiasi antara serikat pekerja dan pengusaha.



Iklim Ketenagakerjaan belum dapat mendorong penciptaan kesempatan kerja. Upaya pemerintah untuk menyempurnakan peraturan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, berkaitan dengan pengupahan, pesangon, pekerja kontrak serta *outsourcing* belum dapat diwujudkan. Selanjutnya keseimbangan antara kebutuhan investasi dalam jangka menengah/panjang, dan memenuhi kebutuhan pekerjaan bagi penganggur yang menginginkan pekerjaan yang baik, termasuk mengupayakan agar pekerja tetap memperoleh hak pesangon yang wajar belum tercapai. Upaya untuk mencapai keseimbangan antara penciptaan kesempatan kerja dan jaminan sosial pekerja menjadi tantangan dalam rangka menyempurnakan peraturan ketenagakerjaan.

Permasalahan lainnya adalah hal yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI). UU ini menjamin kebebasan dan hak serikat pekerja dalam mendorong perundingan bersama di tingkat perusahaan, dan mewajibkan pemberi kerja menegosiasikan perjanjian kerja

bersama (PKB) dengan serikat pekerja di perusahaan-perusahaan yang memiliki pekerja lebih dari 10 orang. Beberapa kelemahan yang berpotensi untuk menghambat perkembangan perundingan bersama adalah (i) aturan main berbagai jenis perlindungan dan standar ketenagakerjaan dalam ruang lingkup yang luas, agar proses negosiasi antara pekerja dan pemberi kerja dapat lebih optimal; (ii) aturan main untuk mendorong pemberi kerja, pekerja dan serikat kerja untuk bertindak dengan itikad baik dalam menjalin hubungan di antara mereka. Menjadi tantangan ke depan adalah mendorong perundingan bipartit antara serikat pekerja dan pengusaha.

Masih lemahnya perundingan antara serikat pekerja dan pengusaha menjadi suatu kendala dan persoalan tersendiri karena dapat menghambat tercapainya suatu kesepakatan kerja bersama antara pekerja dan pengusaha. Pemerintah berperan untuk memfasilitasi organisasi pengusaha dan pekerja agar kapasitasnya dapat menjadi kuat untuk merespon kebutuhan para anggotanya. Peran pemerintah adalah mendorong terciptanya perundingan yang baik antara pekerja dan pemberi kerja, agar tercapai hubungan industrial yang harmonis. Menjadi sebuah tantangan adalah meningkatkan posisi tawar pekerja dalam melakukan perundingan yang baik agar dicapai suatu kesepakatan.

Penyelenggaraan pelatihan berbasis kompetensi belum berkualitas. Lembaga-lembaga pelatihan yang ada masih terbatas kapasitasnya dalam melaksanakan pelatihan berbasis kompetensi. Keterbatasan prasarana, peralatan, sarana pelatihan dan kapasitas sumber daya manusia mengurangi kemampuan lembaga-lembaga pelatihan untuk memberikan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan dunia industri. Penyelenggara pelatihan kerja belum banyak yang mengembangkan standar kompetensi kerja nasional yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Sebaliknya lembaga-lembaga pelatihan kerja yang telah menyelenggarakan pelatihan berbasis kompetensi belum memiliki suatu kriteria dan standar yang lazim digunakan untuk lembaga pelatihan berbasis kompetensi. Tantangan yang dihadapi adalah kemampuan lembaga penelitian yang merespon perubahan pasar kerja yang cepat bekerjasama dengan asosiasi profesi dan industri untuk menentukan jenis-jenis pekerjaan yang dibutuhkan pasar kerja.

Rendahnya pengakuan sertifikat kompetensi pekerja juga terjadi. Kemampuan tenaga kerja Indonesia masih dirasakan sebagai kendala utama bagi dunia usaha. Rendahnya keahlian ini akan mempersempit ruang bagi kebijakan Indonesia untuk meningkatkan struktur produksinya. Jalur pembinaan dan pengembangan SDM ini, masih menghadapi masalah yang sangat mendasar, yaitu adanya *mismatch* antara bidang kejuruan, mutu dan kuantitas yang dibutuhkan pasar kerja dengan yang dihasilkan oleh lembaga pelatihan kerja. Ketimpangan ini dapat pula terjadi karena sistem pelatihan kerja belum berorientasi pada *demand driven*, diikuti lemahnya relevansi dan koordinasi di antara lembaga/intitansi terkait yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pelatihan kerja. Dalam jangka menengah hingga jangka panjang, seiring dengan terjadinya perubahan-perubahan di tempat kerja (*global workplace*) standar kompetensi internasional sudah merupakan keharusan. Pengembangan standar



kompetensi kerja mempertimbangkan berbagai jenis profesi yang berkembang di Indonesia, dengan menentukan skala prioritas pengembangan. Menjadi tantangan adalah mewujudkan sertifikat kompetensi kerja agar dapat diakui secara nasional dan internasional.

Rendahnya pelayanan dan perlindungan pekerja migran juga masalah. Kebijakan yang dibuat belum dapat sepenuhnya memberi penghargaan kepada pekerja dan belum menjamin perlindungan yang memadai. Undang-Undang No. 39 tahun 2004 tentang Perlindungan dan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri masih menghadapi kendala untuk dapat menangani kerentanan yang dihadapi tenaga kerja migran. Kebijakan untuk pekerja migran sejauh ini masih menitikberatkan pada aspek prosedur penempatan tenaga kerja, dan belum diarahkan pada aspek perlindungan pekerja. Hak-hak pekerja migran khususnya perempuan sebagai pekerja domestik dan juga pekerja migran ilegal (tanpa dokumen) berada pada posisi yang tidak menguntungkan, dan hak-hak dasar pekerja masih sering diabaikan. Di dalam negeri, pembekalan bagi calon pekerja melalui peningkatan pengetahuan dan pendidikan masih sangat lemah. Mereka kurang mengetahui hak dan kewajibannya dan kurang mampu melindungi dirinya dari kemungkinan adanya “pemanfaatan” atau bila terjadi masalah hukum di kemudian hari. Peraturan yang selama ini lebih banyak mengatur sering merugikan pekerja dan tidak memberikan opsi atau pilihan untuk kenyamanan pekerja sendiri. Di luar negeri, perlindungan yang sepantasnya diberikan pada tingkat internasional (seperti perjanjian internasional) masih minim. Belum semua negara penempatan memiliki payung hukum bagi perlindungan pekerja, misalnya melalui MOU antara pemerintah RI dan pemerintah negara yang bersangkutan untuk memberikan kenyamanan dan perlindungan yang maksimal. Kebijakan lain yang memberikan perlindungan di dalam dan luar negeri, seperti perluasan akses perbankan termasuk asuransi dan “remitansi” perlu disempurnakan.

Lemahnya koordinasi dan pembagian kewenangan antarinstansi dilakukan dalam rangka penyelenggaraan penempatan. Kompleksnya permasalahan yang dihadapi pekerja migran ke luar negeri disebabkan oleh belum maksimalnya koordinasi antarberbagai kementerian/lembaga, instansi di daerah, dan perusahaan jasa pengirim tenaga kerja sehingga menyebabkan lemahnya penyelenggaraan penempatan. Kebanyakan tenaga kerja migran yang bekerja di luar negeri hanya memiliki keahlian yang marginal (*unskilled labor*). Banyak musibah yang menimpa para pekerja migran di luar negeri, seperti penganiayaan, pemerkosaan, kasus bunuh diri, dan tindak kekerasan lainnya, sampai tidak diberikannya upah selama bekerja. Meskipun terdapat potensi masalah yang timbul ketika bekerja, bekerja di luar negeri masih tetap menjadi pilihan sejumlah besar angkatan kerja Indonesia. Proses rekrutmen calon pekerja ke luar negeri sangat berpotensi menimbulkan risiko besar yang hingga saat ini masih banyak yang dikoordinasi oleh jasa perseorangan (percaloan). Meningkatkan koordinasi dan kerja sama dalam penyelenggaraan penempatan agar dapat menghentikan tindakan percaloan merupakan sebuah tantangan yang dihadapi pemerintah.

Ketersediaan jasa profesional pekerja Indonesia masih terbatas. Namun demikian pasar kerja luar negeri hingga saat ini masih merupakan salah satu alternatif yang dipilih oleh calon pekerja di Indonesia. Saat ini permintaan di berbagai negara untuk mendatangkan tenaga kerja asing profesional dan skilled, seperti teknologi informasi, konstruksi, pengeboran minyak, *care givers*, manufaktur, perhotelan, dan termasuk tenaga kerja asing yang *unskilled*, seperti tenaga musiman untuk kawasan pertanian dan *domestic workers*, semakin meningkat.

Dalam bidang jasa tenaga kerja profesional, Indonesia belum dapat memanfaatkan secara maksimal mekanisme permintaan tenaga terampil melalui *mutual recognition arrangement* (MRA), baik secara multilateral maupun bilateral karena masih sangat terbatasnya jenis kompetensi tenaga kerja Indonesia yang mendapat pengakuan dari negara lain.

Dalam rangka menurunkan tingkat pengangguran terbuka sebesar 5–6 persen pada tahun 2014, sasaran yang hendak dicapai adalah sebagai berikut: (a) meningkatkan posisi tawar para pekerja, (b) meningkatkan produktivitas pekerja, (c) memudahkan mobilitas tenaga kerja dalam melakukan kegiatan ekonomi, dan (d) meningkatkan pekerja dan pemberi kerja dalam merundingkan kesepakatan kerja bersama.

Selama tahun 2010—2014, sasaran penciptaan kesempatan kerja diperkirakan sebesar 9,6–10,7 juta pekerja. Sektor pertanian menyerap rata-rata 1,1–1,2 juta orang, sektor industri pengolahan 2,1–2,4 juta orang, dan sektor perdagangan, bangunan, jasa dan lainnya menyerap 6,4–7,1 juta orang.

3.2.10 Koperasi dan UMKM

Koperasi dan UMKM masih menghadapi berbagai permasalahan yang mendasar dalam menjalankan usahanya, termasuk tantangan untuk berkompetensi dan berkompetisi dalam persaingan pasar global yang cukup berat. Untuk itu, pemberdayaan koperasi dan UMKM masih perlu dilanjutkan dalam periode lima tahun mendatang.

Koperasi dan UMKM dalam periode lima tahun ke depan masih menghadapi masalah yang terkait dengan belum kondusifnya iklim usaha sebagai akibat dari (a) belum efektifnya koordinasi dan sinkronisasi program dan kegiatan pemberdayaan koperasi dan UMKM yang direncanakan dan diimplementasikan oleh berbagai kementerian dan lembaga; (b) adanya prosedur dan administrasi berbiaya tinggi; (c) keterbatasan dukungan sarana dan prasarana untuk pemberdayaan koperasi dan UMKM; serta (d) kurangnya partisipasi seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, organisasi nonpemerintah dan masyarakat dalam pemberdayaan koperasi dan UMKM.

Berkaitan dengan permasalahan tersebut di atas, sasaran pembangunan yang



akan dicapai dalam periode lima tahun ke depan adalah sebagai berikut: (1) terlaksananya pemberdayaan koperasi dan UMKM dalam suatu program nasional sebagai langkah strategis pemaduan dan penyelarasan program dan kegiatan kementerian dan lembaga sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama mereka yang mengandalkan kehidupannya dari kegiatan koperasi dan kegiatan UMKM; (2) terwujudnya paradigma pemberdayaan koperasi dan UMKM yang lebih koordinatif, *business oriented*, dan partisipatif; (3) terwujudnya birokrasi yang lebih efisien didasarkan pada pemenuhan kebutuhan dari, oleh, dan untuk masyarakat lokal; serta (4) meningkatnya peran lembaga-lembaga masyarakat pendukung koperasi dan UMKM.

Sementara itu, Koperasi dan UMKM juga masih menghadapi masalah dalam pengembangan produk dan pemasarannya. Permasalahan tersebut meliputi: (a) terbatasnya akses koperasi dan UMKM kepada teknologi dan lembaga Litbang; (b) kurangnya kepedulian koperasi dan UMKM mengenai prasyarat mutu, desain produk dan kebutuhan konsumen; (c) kurangnya insentif untuk berkembangnya lembaga pendukung koperasi dan UMKM; (d) belum terbangunnya prinsip kemitraan dalam satu kesatuan struktur/strategi pengembangan usaha bersama yang bersinergi sesuai dengan rantai nilai (*value chain*); serta (e) masih adanya *gap* antara kebutuhan pertumbuhan UMKM yang tinggi dan ketersediaan sumber daya.

Sejalan dengan permasalahan tersebut di atas, sasaran pembangunan yang akan dicapai adalah (1) tersedianya teknologi dan hasil-hasil litbang yang sesuai dengan kebutuhan dan skala usaha koperasi dan UMKM; (2) meningkatnya kemampuan *technopreneurship* koperasi dan UMKM; (3) meningkatnya jumlah, kapasitas dan jangkauan lembaga penyedia jasa pengembangan dan pembiayaan usaha; (4) berkembangnya jaringan usaha yang berbasis kemitraan yang kuat; serta (5) berkembangnya lembaga pendukung usaha yang dapat memfasilitasi perkembangan kompetensi dan posisi tawar usaha mikro.

Selanjutnya, koperasi dan UMKM juga masih menghadapi rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM), yang dicirikan oleh (a) belum dipertimbangkannya karakteristik wirausaha dalam sistem pengembangan UMKM; (b) rendahnya kapasitas pengusaha skala mikro, kecil, dan menengah serta pengelola koperasi; (c) masih rendahnya motivasi dan budaya wirausaha mikro dalam membangun kepercayaan; serta (d) masih rendahnya tingkat keterampilan dan kapasitas pengelolaan usaha.

Terkait dengan permasalahan tersebut di atas, sasaran pembangunan yang akan dicapai adalah (1) berfungsinya sistem pengembangan budaya usaha dan kompetensi wirausaha sesuai dengan karakteristik koperasi dan UMKM; (2) meningkatnya kompetensi teknis dan manajemen pengusaha skala mikro, kecil, dan menengah serta pengelola koperasi, terutama dalam (1) menghasilkan produk yang berkualitas, inovatif dan kreatif; dan (2) mengembangkan usaha dan pemasaran produknya; (3) meningkatnya kualitas sistem pengembangan kompetensi pengusaha skala mikro, kecil,

dan menengah serta pengelola koperasi; serta (4) meningkatnya budaya wirausaha dan daya tahan usaha mikro.

Kinerja koperasi masih belum menunjukkan perbaikan kualitas. Kelembagaan koperasi masih menghadapi masalah sebagai berikut, yaitu (a) kurangnya pemahaman anggota terhadap prinsip dan asas berkoperasi; (b) belum optimalnya fungsi koperasi dalam mengembangkan potensi ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan anggotanya; serta (c) belum optimalnya peran pembina, penyuluh, dan lembaga gerakan koperasi.

Sehubungan dengan permasalahan tersebut di atas, sasaran pembangunan yang akan dicapai adalah (1) berkembangnya praktek berkoperasi yang sesuai dengan prinsip dan asas koperasi; (2) meningkatnya peran koperasi dalam memfasilitasi perkembangan usaha dan kesejahteraan anggota; serta (3) meningkatnya efektivitas pembinaan dan penyuluhan perkoperasian dalam perbaikan manajemen dan kelembagaan koperasi.

3.2.11 Jaminan Sosial

Perlindungan sosial di Indonesia sejauh ini masih terfokus pada program-program bantuan sosial saja dan belum mengarah pada perlindungan sosial yang lebih stabil, seperti jaminan sosial. Permasalahan ini harus diatasi karena Indonesia menghadapi tuntutan yang semakin tingginya daya saing tenaga kerja dan perubahan struktur demografi menuju ke arah *aging population*. Hal ini harus diperhatikan oleh pemerintah, terutama terkait dengan pengembangan skema jaminan sosial yang memadai bagi seluruh masyarakat.

Seperti disajikan di muka, saat ini cakupan jaminan sosial di Indonesia terbatas pada pegawai pemerintah (PNS, TNI, dan Polri) dan sebagian kecil pegawai sektor swasta. Selain itu, jenis layanan jaminan sosial masih terbatas dan jumlah manfaat pensiun dan tunjangan hari tua yang diterima oleh peserta juga masih minim.

Di sisi lain, pendanaan jaminan sosial bagi PNS, TNI, dan Polri masih sangat bergantung pada anggaran pemerintah. Saat ini, kontribusi pemerintah untuk menyelenggarakan jaminan sosial diperkirakan sebesar 0,5 persen dari PDB dan diperkirakan akan terus meningkat hingga 2,5 persen dari PDB di tahun 2050 (ADB, 2007). Hal ini akan berpengaruh pada semakin beratnya beban yang ditanggung oleh anggaran negara dalam melaksanakan pembangunan. Jika dibandingkan dengan praktik di negara-negara lain, kontribusi pekerja dan pemberi kerja di Indonesia dalam penyelenggaraan jaminan sosial masih relatif rendah.

Kemudian, permasalahan lainnya adalah harmonisasi lembaga-lembaga penyelenggara jaminan sosial yang memerlukan perhatian khusus dan melibatkan berbagai pihak pemangku kepentingan terkait. Pengelolaan jaminan sosial saat ini masih terpisah-pisah dengan karakteristik yang berbeda, sedangkan UU SJSN mensyaratkan adanya suatu perubahan yang signifikan dalam hal restrukturisasi



pengelolaan dan penyelenggaraan jaminan sosial.

Di masyarakat, permasalahan umum yang dihadapi dalam pengembangan skema jaminan sosial ini adalah jaminan sosial berbasis asuransi yang mewajibkan iuran oleh peserta belum dikenal secara luas. Kesadaran seluruh lapisan masyarakat terhadap pentingnya jaminan sosial sebagai skema perlindungan masih rendah.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, berbagai program dan kegiatan di bidang jaminan sosial, diarahkan untuk mencapai berbagai sasaran sebagai berikut:

1. tersedianya nomor identitas tunggal bagi setiap peserta jaminan sosial;
2. tersusunnya perangkat hukum sebagai dasar pelaksanaan SJSN yang mencakup UU BPJS, serta Peraturan Pemerintah turunan UU SJSN yang mencakup Jaminan Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun, Jaminan Kematian, dan Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pengembangan Dana Jaminan Sosial;
3. tersusunnya berbagai studi dan kajian di bidang jaminan sosial untuk memperkuat pelaksanaan SJSN;
4. terwujudnya harmonisasi regulasi di bidang jaminan sosial;
5. terselenggaranya jaminan sosial berbasis asuransi bagi seluruh pekerja formal dan informal dengan prioritas utama asuransi kesehatan;
6. meningkatnya jangkauan/cakupan jaminan sosial terhadap pekerja miskin (yang tidak mampu memberikan kontribusi/iuran);
7. meningkatnya kualitas manfaat jaminan sosial bagi pekerja;
8. terciptanya sistem, prosedur, serta struktur organisasi penyelenggara jaminan sosial yang efisien dan efektif;
9. meningkatnya sarana dan prasarana pendukung dalam pelaksanaan program jaminan sosial.

Keseluruhan sasaran tersebut harus dicapai dalam pelaksanaan jaminan sosial yang lebih baik. Dampak dari pelaksanaan jaminan sosial yang diharapkan adalah terlindunginya setiap masyarakat Indonesia yang pada akhirnya akan meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.

3.3 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN

Pembangunan bidang ekonomi ditujukan untuk menjawab berbagai permasalahan dan tantangan di berbagai bidang dan pada akhirnya bermuara pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Oleh sebab itu, pembangunan bidang ekonomi harus dilaksanakan secara sinergi dengan bidang-bidang yang lain untuk mencapai peningkatan kesejahteraan rakyat. Dalam rangka penciptaan peningkatan kesejahteraan

rakyat, dalam RPJM 2010-2014 kondisi utama yang harus diciptakan adalah (1) pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan; (2) penciptaan stabilitas ekonomi yang kokoh; serta (3) pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan.

Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan

Untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan adalah elemen yang tidak bisa ditinggalkan. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi menggambarkan terjadinya peningkatan dan perluasan kegiatan ekonomi suatu negara. Peningkatan tersebut akan mendorong pada terbukanya kesempatan kerja baru bagi rakyat. Selain itu, pertumbuhan ekonomi yang positif memungkinkan suatu negara untuk meningkatkan teknologi dan kemampuannya melakukan akumulasi modal (baik fisik maupun modal sumber daya manusia) yang kemudian akan berdampak positif pada produktivitas. Terbukanya lapangan pekerjaan baru dan peningkatan produktivitas pada akhirnya berimplikasi positif pada penghasilan yang diterima rakyat. Apabila hal ini berkelanjutan, tingkat kesejahteraan rakyat akan meningkat.

Pertumbuhan ekonomi dapat didorong dari dua sisi, yakni sisi permintaan dan sisi penawaran. Dari sisi permintaan ada empat komponen utama di dalamnya yang perlu mendapatkan perhatian. **Pertama** adalah investasi yang memegang peran penting bagi pertumbuhan ekonomi. Terciptanya akumulasi modal dapat meningkatkan produktivitas seiring dengan tingkat investasi yang tinggi. Karena kebutuhan investasi masih belum mampu dipenuhi oleh penanaman modal dalam negeri, usaha untuk menarik investasi asing masuk Indonesia masih harus terus dilakukan, terutama melalui usaha perbaikan iklim investasi yang terus-menerus. Selain itu, investasi masih terpusat pada daerah dan industri tertentu. Dengan demikian, langkah kebijakan diversifikasi dan penyebaran investasi harus secara intensif dilakukan, disesuaikan dengan potensi atau sumber daya spesifik yang dimiliki daerah atau industri.

Kedua adalah ekspor yang juga merupakan sumber bagi pertumbuhan ekonomi. Dari waktu ke waktu kinerja ekspor Indonesia terus menunjukkan perbaikan. Namun, peningkatan kinerja ekspor pertanian dan pertambangan masih sangat dipengaruhi oleh peningkatan harga di pasar internasional. Seiring dengan peningkatan persaingan di pasar global, peningkatan ekspor akan lebih diutamakan pada produk-produk yang mampu memberikan nilai tambah yang lebih besar, peningkatan diversifikasi pasar tujuan ekspor, dan peningkatan daya saing produk ekspor. Peningkatan daya saing produk ekspor dilakukan dengan menurunkan biaya logistik, meningkatkan ketersediaan infrastruktur, mengurangi pungutan liar, dan menyederhanakan peraturan dan prosedur perizinan, sehingga biaya ekonomi dapat ditekan.

Ketiga, kebijakan menjaga daya beli. Daya beli rakyat akan dapat ditingkatkan apabila pendapatan masyarakat mengalami peningkatan. Selain itu, masyarakat akan merasa sejahtera ketika dapat membeli kebutuhan sehari-hari dengan mudah. Hal ini



tidak dapat terjadi apabila harga meningkat tiba-tiba, sementara penghasilannya tetap (daya beli rakyat turun). Oleh karena itu, dalam menjaga daya beli rakyat, salah satu langkah kebijakan yang perlu dilakukan adalah menjaga tingkat inflasi. Untuk itu harus diantisipasi faktor-faktor yang menimbulkan gejolak inflasi, terutama yang terkait dengan proses distribusi dan pergerakan harga di pasar internasional. Apabila daya beli terjaga, tingkat konsumsi rakyat juga akan terjaga, yang kemudian akan mendukung pula terciptanya pertumbuhan ekonomi. Hal ini menjadi penting, terutama apabila mengingat masih tingginya kontribusi konsumsi rumah tangga bagi pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Keempat, optimalisasi pengeluaran pemerintah dan pengelolaan kekayaan negara. Pengeluaran pemerintah memiliki peran yang tidak kalah penting apabila dibandingkan dengan komponen pertumbuhan ekonomi lainnya, terutama di saat terjadi ancaman krisis ekonomi. Pemberian stimulus fiskal diharapkan mampu mendorong peningkatan permintaan, serta menutupi penurunan permintaan akibat turunnya investasi dan ekspor. Namun, pengeluaran pemerintah juga dibatasi oleh ketersediaan anggaran (*resource envelope*) yang dimiliki. Apabila pengeluaran terlalu besar, defisit anggaran akan membesar, dan dapat mengancam keberlangsungan kebijakan fiskal ke depan. Di sisi lain, pengeluaran yang terlalu besar juga dapat mengurangi porsi konsumsi dan investasi swasta dalam perekonomian (*crowding out effect*). Untuk itu, pemerintah perlu meningkatkan optimalisasi pengeluarannya secara efektif dan efisien, yang didukung dengan pengelolaan aset secara akuntabel dan bertanggung jawab melalui pengelolaan kekayaan negara yang andal dan kredibel.

Dari sisi penawaran, pertumbuhan ekonomi akan diperoleh melalui peningkatan produksi. Sektor yang diharapkan menjadi pendorong utama peningkatan pertumbuhan ekonomi dari sisi produksi adalah sektor industri manufaktur. Hal ini terjadi karena sektor industri manufaktur dapat memberikan nilai tambah yang besar. Di luar sektor industri manufaktur, masih diandalkan pula sektor pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan, dan perikanan dalam mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi. Selain itu, sektor-sektor lain juga diharapkan dapat mendukung peningkatan produksi demi meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Dalam rangka terwujudnya pertumbuhan yang berkelanjutan, pertumbuhan ekonomi dalam tahun 2010-2014 diharapkan meningkat rata-rata 6,3-6,8 persen per tahun. Dari sisi permintaan, pertumbuhan ekonomi ini didukung oleh pertumbuhan investasi sebesar 9,1-10,8 persen, pertumbuhan ekspor sebesar 10,7-11,6 persen, pertumbuhan konsumsi rumah tangga sebesar 5,3-5,4 persen, dan pertumbuhan konsumsi pemerintah sebesar 10,6-11,7 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan ekonomi ini didukung oleh pertumbuhan sektor pertanian dengan rata-rata sebesar 3,6-3,7 persen dan pertumbuhan sektor industri pengolahan yang tumbuh rata-rata sebesar 5,5-6,0 persen.

Stabilitas Ekonomi yang Kokoh

Terciptanya stabilitas ekonomi makro merupakan kondisi yang tidak kalah pentingnya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi. Perekonomian nasional hanya dapat memberikan kinerja yang baik apabila didukung oleh kestabilan ekonomi yang kokoh. Volatilitas pada harga barang, tingkat suku bunga, tingkat pertumbuhan ekonomi, atau utang pemerintah dapat memberikan gangguan pada perekonomian, terutama sektor swasta, yang membutuhkan kepastian dalam menjalankan usahanya yang pada gilirannya akan memengaruhi kesejahteraan masyarakat.

Dalam rangka menciptakan stabilitas ekonomi yang kokoh stabilitas harga dan stabilitas nilai tukar harus dapat dijaga. Gejolak harga yang tinggi selain mengurangi daya beli masyarakat juga akan menimbulkan ketidakpastian dalam berusaha. Nilai tukar yang belfluktuasi juga akan menimbulkan ketidakpastian bagi kinerja sektor perdagangan karena ketika nilai tukar terlalu menguat daya saing ekspor akan menurun dan sebaliknya ketika nilai tukar melemah perekonomian akan terganggu oleh tingginya harga impor. Untuk mengatasi kedua permasalahan tersebut langkah kebijakan moneter harus dipertajam.

Stabilitas ekonomi juga didukung oleh kebijakan fiskal yang berkelanjutan. Tingkat defisit atau utang yang terlalu tinggi akan meningkatkan ketidakpercayaan swasta kepada pemerintah. Kebijakan anggaran defisit akan mendorong pemerintah untuk mencari sumber pembiayaan, baik luar negeri dalam bentuk pinjaman luar negeri maupun dari pinjaman dalam negeri dalam bentuk penerbitan surat berharga negara (SBN). Dengan kebijakan seperti ini, risiko memegang obligasi negara semakin meningkat yang pada gilirannya mendorong tingginya *yield* yang harus dibayarkan pemerintah. Bila itu terjadi, stabilitas makroekonomi dapat terganggu. Pengelolaan tingkat defisit anggaran dan utang yang baik (melalui *debt switch* atau *buy back*) yang ada dalam kebijakan fiskal dan berkelanjutan menjadi penting dalam menyokong terciptanya stabilitas makroekonomi.

Stabilitas ekonomi juga sangat bergantung pada sektor kebijakan sektor keuangan. Krisis ekonomi Indonesia tahun 1998 berawal dari krisis di sektor keuangan yang selanjutnya memberikan pengaruh buruk pada seluruh bidang pembangunan. Krisis ekonomi dunia yang baru saja terjadi juga dipicu oleh krisis di sektor keuangan. Oleh karena itu, stabilitas sektor keuangan ini harus menjadi fokus utama dalam mendukung stabilitas ekonomi yang kokoh.

Dalam rangka terciptanya stabilitas ekonomi yang kokoh, diharapkan tingkat inflasi dapat dijaga sebesar rata-rata 4,0-6,0 persen per tahun pada tahun 2010-2014, volatilitas nilai tukar rupiah terjaga, dan cadangan devisa berkisar USD 101,4 miliar sampai USD 105,5 miliar pada tahun 2014. Sementara itu, dari sisi keuangan negara, defisit anggaran pada tahun 2014 diupayakan pada tingkatan yang aman sekitar 1,2-1,9



persen.

Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berkeadilan

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan stabilitas ekonomi akan menjadi kurang berarti apabila hanya dinikmati oleh sebagian kelompok masyarakat. Kondisi seperti ini menunjukkan bahwa hanya sebagian kecil rakyat yang menikmati peningkatan kesejahteraan rakyat sehingga tidak sesuai dengan tujuan pembangunan bidang ekonomi. Oleh sebab itu, pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan merupakan elemen penting yang menjamin pengembangan ekonomi dapat dinikmati oleh semua rakyat secara adil.

Pembangunan ekonomi inklusif adalah pembangunan yang memberikan kesempatan pada seluruh anggota masyarakat untuk berpartisipasi dan berkontribusi dalam proses pertumbuhan ekonomi dengan status yang setara, terlepas dari latar belakang mereka. Dengan demikian, pembangunan ekonomi inklusif menciptakan kesempatan bagi semua dan memastikan akses yang sama terhadap kesempatan tersebut.

Pencapaian pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan didukung oleh kebijakan pada sektor tenaga kerja, kemiskinan, dan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Di sisi kebijakan tenaga kerja, kebijakan-kebijakan seperti pelatihan, pembekalan, pengembangan sekolah menengah kejuruan (SMK) dapat memberikan tambahan *skill* bagi tenaga kerja sehingga memudahkan untuk dapat mengisi lowongan kerja yang tersedia. Dengan begitu, semakin banyak orang terlibat dalam proses pembangunan.

Terkait dengan kebijakan pengurangan kemiskinan, pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan memiliki kaitan yang sangat erat. Pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan dapat memiliki dampak positif terhadap agenda pengurangan kemiskinan. Hal ini dapat ditempuh melalui (1) dampak pertumbuhan ekonomi akan meningkat ketika kesenjangan berhasil diatasi, (2) pembangunan ekonomi yang inklusif dapat meningkatkan efektivitas kebijakan pengurangan kemiskinan dengan memfokuskan pada penciptaan dan pemberian akses yang sama pada kesempatan kerja. Dengan begitu, mereka yang selama ini miskin karena tidak pernah mendapat kesempatan, dapat memanfaatkan kesempatan yang ada untuk keluar dari kemiskinan. Sebaliknya, kebijakan pengurangan kemiskinan melalui pemberian bantuan untuk pemenuhan kebutuhan dasar (pendidikan dan kesehatan) juga akan memberikan dukungan pada terciptanya pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan.

Di samping kebijakan di ketenagakerjaan dan kebijakan dalam pengurangan kemiskinan, pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan harus didukung oleh kebijakan UKM untuk pengembangan UKM. Dengan keterbatasan sektor formal untuk menampung tenaga kerja, kesempatan bagi mereka yang tidak tertampung untuk turut

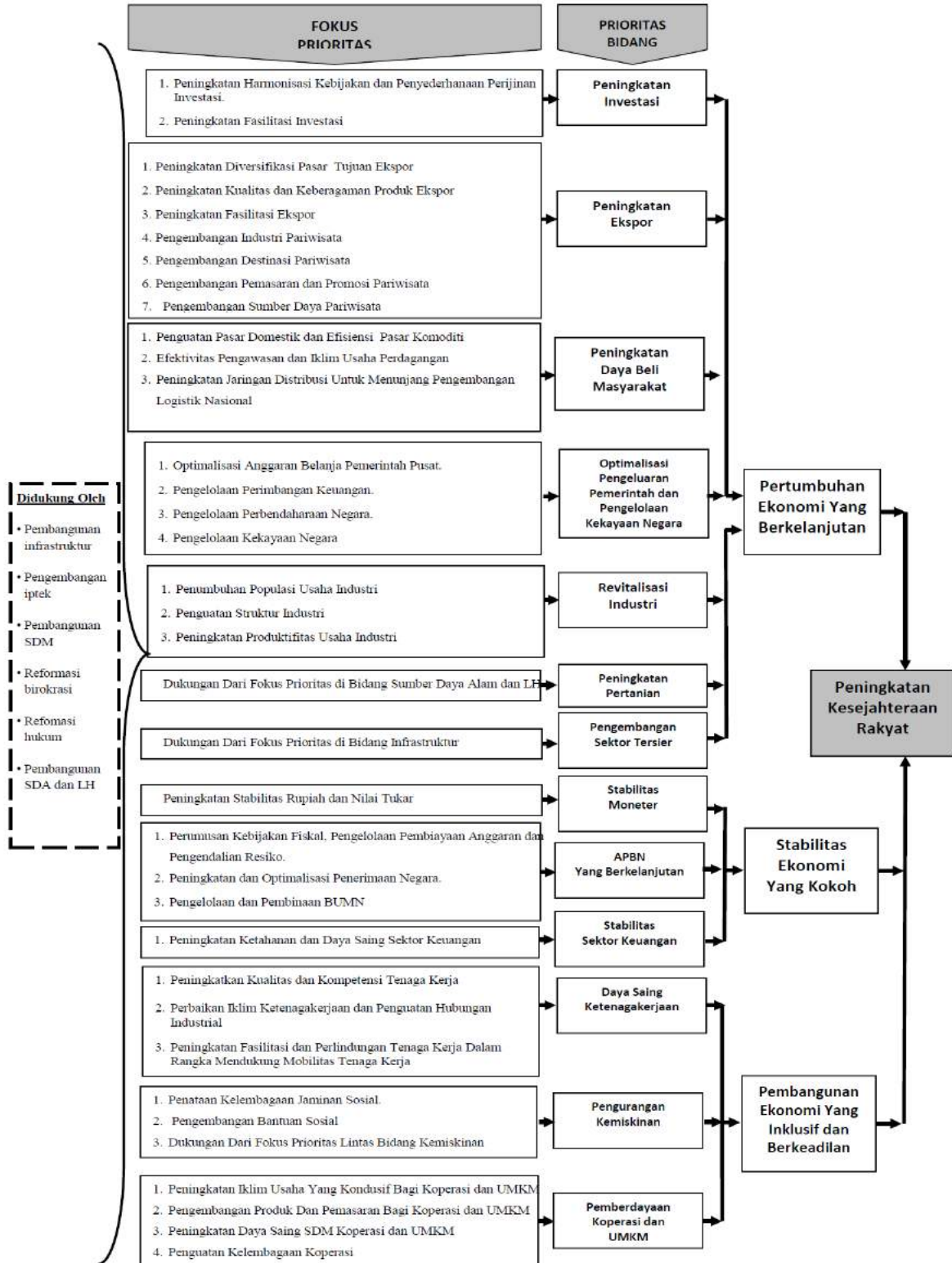
serta dalam proses pembangunan adalah melalui sektor-sektor informal. Oleh sebab itu, pengembangan UKM penting dilakukan, baik pengembangan yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang terkait dengan keterbatasan dana dan peningkatan kemampuan sumber daya SDM dalam bentuk pemberian pelatihan yang memungkinkan UMKM dapat berkembang dengan kemampuannya sendiri.

Dalam rangka terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berkeadilan, pada tahun 2014 tingkat kemiskinan diharapkan dapat diturunkan menjadi sekitar 8,0-10,0 persen, dan tingkat pengangguran dapat diturunkan menjadi 5,0-6,0 persen.

Selama lima tahun ke depan, dalam rangka melaksanakan prioritas pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, penciptaan stabilitas yang kokoh serta pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan maka strategi dan arah kebijakan yang akan ditempuh adalah sebagai berikut.



GAMBAR 3.7 ALUR PIKIR PEMBANGUNAN BIDANG EKONOMI



3.3.1 Peningkatan Investasi

Tantangan dalam meningkatkan daya tarik investasi ke depan semakin berat. Oleh sebab itu pembangunan investasi dalam periode tahun 2010-2014 diarahkan untuk hal-hal sebagai berikut:

1. mendukung terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi secara berkelanjutan dan berkualitas dengan mewujudkan iklim investasi yang menarik;
2. mendorong penanaman modal asing bagi peningkatan daya saing perekonomian nasional; serta meningkatkan kapasitas infrastruktur fisik dan pendukung yang memadai, investasi yang dikembangkan dalam rangka penyelenggaraan demokrasi ekonomi akan dipergunakan sebesar-besarnya untuk pencapaian kemakmuran bagi rakyat;
3. menciptakan iklim investasi yang berdaya saing dan meningkatnya realisasi investasi di seluruh wilayah Indonesia.

Strategi pembangunan investasi dalam lima tahun ke depan adalah sebagai berikut (1) mendorong berkembangnya investasi di berbagai sektor terutama pangan, energi dan infrastruktur dalam rangka meningkatkan persebaran investasi; (2) mendorong berkembangnya investasi berbasis keunggulan daerah, antara lain sektor perkebunan, perikanan dan peternakan dalam rangka penciptaan kesempatan kerja; (3) meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebijakan investasi melalui harmonisasi dan simplifikasi berbagai perangkat peraturan, baik di pusat maupun di daerah; dan (4) mendorong percepatan ketersediaan infrastruktur dalam arti luas melalui peningkatan efektivitas pelaksanaan kemitraan pemerintah dan dunia usaha dalam rangka meningkatkan daya tarik investasi; serta (5) mendorong pengembangan kawasan ekonomi khusus untuk produk yang bernilai tambah antara lain, industri barang dari kulit dan alas kaki, sektor transportasi, sektor jasa-jasa lainnya, industri berbasis petrokimia, industri permesinan, mesin listrik dan peralatan listrik, dan industri tekstil dan produk tekstil (TPT).

Berdasarkan strategi dan arah kebijakan pembangunan di atas, fokus prioritas investasi dalam RPJMN 2010-2014 adalah sebagai berikut:

1. Fokus Prioritas Peningkatan Harmonisasi Kebijakan dan Penyederhanaan Perizinan Investasi yang didukung oleh kegiatan prioritas sebagai berikut:
 - a. peningkatan Deregulasi Kebijakan Penanaman Modal;
 - b. pengembangan Potensi Penanaman Modal Daerah;
 - c. pemberdayaan Usaha Nasional;
 - d. peningkatan Kualitas Pelayanan Persetujuan Penanaman Modal;
 - e. peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan Penanaman Modal;

- f. peningkatan Kualitas Pelayanan Fasilitas Penanaman Modal;
 - g. koordinasi peningkatan Ekspor dan Peningkatan Investasi (PEPI).
 - h.
2. Fokus Prioritas Peningkatan Fasilitasi Investasi yang didukung oleh kegiatan prioritas sebagai berikut:
- a. pengembangan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE);
 - b. pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - c. peningkatan Pelayanan Hukum Penanaman Modal;
 - d. pembangunan/Pengadaan/Peningkatan Sarana dan Prasarana;
 - e. penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Penanaman Modal;
 - f. pengembangan Penanaman Modal di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK);
 - g. koordinasi Pengembangan Urusan Penataan Ruang dan Pengembangan Wilayah (termasuk KEK, KAPET, dan kawasan lainnya);
 - h. perencanaan Pengembangan Penanaman Modal Sektor Industri Agribisnis dan Sumber Daya Alam Lainnya;
 - i. perencanaan Pengembangan Penanaman Modal Sektor Industri Manufaktur;
 - j. perencanaan Pengembangan Penanaman Modal di Bidang Sarana, Prasarana, Jasa dan Kawasan;
 - k. peningkatan Kualitas Strategi Promosi Bidang Penanaman Modal;
 - l. promosi Penanaman Modal Sektoral Terpadu dan Terintegrasi di Dalam dan Luar Negeri;
 - m. fasilitasi Daerah dalam Rangka Kegiatan Promosi Penanaman Modal;
 - n. penyelenggaraan Pameran dan Penyediaan Sarana Promosi Penanaman Modal untuk Kegiatan di Dalam dan di Luar Negeri;
 - o. kerjasama Bilateral dan Multilateral di Bidang Penanaman Modal;
 - p. kerjasama Regional di Bidang Penanaman Modal;
 - q. kerjasama dengan Dunia Usaha Asing di Dalam dan di Luar Negeri di Bidang Penanaman Modal;
 - r. pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal Wilayah I;
 - s. pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal Wilayah II;

- t. pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal Wilayah III;
- u. pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal Wilayah IV;
- v. koordinasi pengembangan urusan penataan ruang dan pengembangan wilayah (termasuk KEK, KAPET, dan kawasan lainnya).

3.3.2 Peningkatan Ekspor

Upaya untuk meningkatkan ekspor ditempuh melalui kebijakan perdagangan luar negeri yang dalam lima tahun ke depan diarahkan pada peningkatan daya saing produk ekspor nonmigas melalui diversifikasi pasar serta peningkatan keberagaman dan kualitas produk. Kebijakan tersebut didukung pula oleh penguatan perdagangan dalam negeri untuk menjaga kestabilan harga, kelancaran arus barang, serta menciptakan iklim usaha yang sehat. Dengan demikian, strategi pembangunan yang akan dilaksanakan dalam pembangunan perdagangan luar negeri, khususnya untuk mendorong peningkatan ekspor nonmigas, selama periode 2010-2014 adalah sebagai berikut:

1. meningkatkan ekspor nonmigas untuk produk-produk yang bernilai tambah lebih besar, berbasis pada sumber daya alam, serta permintaan pasarnya besar; oleh sebab itu, pengembangan produk ekspor ke depan akan dititikberatkan pada hasil perkebunan dan produk olahannya, hasil perikanan dan produk olahannya, produk olahan pertambangan, produk makanan/minuman olahan, tekstil dan produk tekstil, mesin dan peralatan listrik, kimia dan produk kimia, serta produk dari kulit dan alas kaki;
2. mendorong ekspor produk kreatif dan jasa yang terutama dihasilkan oleh usaha kecil menengah (UKM);
3. mendorong upaya diversifikasi pasar tujuan ekspor untuk mengurangi tingkat kebergantungan kepada pasar ekspor tertentu;
4. menitikberatkan upaya untuk perluasan akses pasar, promosi, dan fasilitasi ekspor non migas di kawasan Afrika dan Asia;
5. mendorong pemanfaatan berbagai skema perdagangan, dan kerjasama perdagangan internasional yang lebih menguntungkan kepentingan nasional;
6. mendorong pengembangan aktivitas perdagangan di daerah perbatasan yang dapat dimanfaatkan sebagai pintu gerbang aktivitas ekonomi dan perdagangan dengan negara tetangga; serta
7. memperkuat kelembagaan dan pembiayaan perdagangan luar negeri yang mendorong efektivitas pengembangan ekspor nonmigas.

Berdasarkan strategi dan arah kebijakan pembangunan tersebut, maka fokus prioritas dan kegiatan prioritas untuk perdagangan luar negeri adalah sebagai berikut:



1. Fokus Prioritas Peningkatan Diversifikasi Pasar Tujuan Ekspor, yang didukung oleh kegiatan prioritas sebagai berikut:
 - a. peningkatan kualitas promosi dan kelembagaan ekspor;
 - b. pengembangan pasar dan produk di wilayah Afrika dan Timur Tengah;
 - c. pengembangan pasar dan produk di wilayah Asia, Australia, dan Selandia Baru;
 - d. pengembangan SDM bidang ekspor;
 - e. peningkatan peran dan kemampuan diplomasi perdagangan internasional;
 - f. peningkatan kerjasama dan perundingan bilateral kawasan Asia, Amerika, dan Australia;
 - g. peningkatan kerjasama dan perundingan bilateral kawasan Afrika, Eropa, dan Timur Tengah.
2. Fokus Prioritas Peningkatan Kualitas dan Keberagaman Produk Ekspor, yang didukung oleh kegiatan prioritas sebagai berikut:
 - a. peningkatan Pengawasan dan Pengendalian Mutu Barang;
 - b. pengembangan Standardisasi Bidang Perdagangan;
 - c. peningkatan kerja sama di Bidang Perdagangan Jasa;
 - d. pengembangan pasar dan Produk Wilayah Amerika dan Eropa;
 - e. koordinasi Peningkatan dan Pengembangan Ekspor.
3. Fokus Prioritas Peningkatan Fasilitasi Ekspor, yang didukung oleh kegiatan prioritas sebagai berikut:
 - a. pengelolaan Fasilitasi Ekspor dan Impor;
 - b. peningkatan Pengamanan dan Perlindungan Akses Pasar;
 - c. pengelolaan Impor;
 - d. dukungan sektor perdagangan terhadap pengembangan kawasan ekonomi khusus;
 - e. perumusan kebijakan dan pengembangan teknologi informasi kepabeanan dan cukai;
 - f. perumusan kebijakan dan bimbingan teknis fasilitas bidang kepabeanan;
 - g. koordinasi Pengembangan dan Penerapan Sistem National Single Window (NSW) dan ASEAN Single Window (ASW);
 - h. koordinasi Pengembangan kerja sama ekonomi dan pembiayaan Eropa, Afrika dan Timur Tengah;

- i. koordinasi Pengembangan kerja sama Ekonomi Dan Pembiayaan Asia.

3.3.3 Peningkatan Daya Saing Pariwisata

Dengan memperhatikan permasalahan dan tantangan yang dihadapi serta dalam pencapaian sasaran pembangunan kepariwisataan nasional, kebijakan pembangunan kepariwisataan tahun 2010-2014 diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat, dengan tetap memperhatikan asas manfaat, kekeluargaan, adil dan merata, keseimbangan, kemandirian, kelestarian, partisipasi masyarakat, berkelanjutan, demokratis, kesetaraan, dan kesatuan serta berpegang pada prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Strategi pembangunan kepariwisataan yang merupakan salah satu bagian yang tidak terpisahkan dari prioritas peningkatan ekspor adalah sebagai berikut.

1. Mengembangkan industri pariwisata dengan menciptakan iklim yang kondusif bagi pertumbuhan investasi dan peluang usaha yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan, dan penyerapan tenaga kerja;
2. Mengembangkan destinasi pariwisata dengan mendorong perbaikan dan peningkatan kualitas jaringan prasarana dan sarana pendukung pariwisata, melakukan konsolidasi akses transportasi mancanegara dan dalam negeri, terutama ke sepuluh tujuan pariwisata Indonesia, dan mengembangkan kawasan strategis dan daya tarik pariwisata berbasis wisata bahari, alam, dan budaya di luar Jawa dan Bali, termasuk industri kreatif, serta mengembangkan desa wisata melalui PNPM Mandiri;
3. Mengembangkan pemasaran dan promosi pariwisata dengan meningkatkan jumlah wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara sebesar 20 (dua puluh) persen secara bertahap dalam 5 (lima) tahun dan mempromosikan ke 10 (sepuluh) tujuan pariwisata Indonesia melalui saluran pemasaran dan pengiklanan yang kreatif dan efektif, serta menguatkan strategi pemasaran dan promosi pariwisata terpadu berbasis teknologi informasi dan komunikasi, dan responsif terhadap pasar;
4. Mengembangkan sumber daya pariwisata dengan strategi meningkatkan kapasitas pemerintah dan pemangku kepentingan pariwisata lokal untuk mencapai tingkat mutu pelayanan dan *hospitality management* yang kompetitif di kawasan Asia, dan meningkatkan kualitas penelitian dan pengembangan kepariwisataan.

Strategi tersebut diatas didukung oleh peningkatan koordinasi lintas sektor pada tataran kebijakan, program, dan kegiatan kepariwisataan, terutama di bidang (a) pelayanan kepabeanan keimigrasian, dan karantina; (b) keamanan dan ketertiban; (c) prasarana umum yang mencakup jalan, air bersih, listrik, telekomunikasi, dan kesehatan



lingkungan; (d) transportasi darat, laut, dan udara; dan (e) bidang promosi dan kerja sama luar negeri; serta koordinasi dan kerja sama dengan pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat.

Berdasarkan strategi dan arah kebijakan pembangunan tersebut, fokus prioritas dan kegiatan prioritas kepariwisataan dalam RPJMN 2010-2014 adalah sebagai berikut:

1. Fokus Prioritas Pengembangan Industri Pariwisata, yang didukung oleh kegiatan prioritas:
 - a. Pengembangan Usaha, Industri, dan Investasi Pariwisata; dan
 - b. Pengembangan Standardisasi Pariwisata.
2. Fokus Prioritas Pengembangan Tujuan Pariwisata yang didukung oleh kegiatan prioritas:
 - a. Pengembangan Daya Tarik Pariwisata;
 - b. Pemberdayaan Masyarakat di Tujuan Pariwisata;
 - c. Peningkatan PNPM Mandiri Bidang Pariwisata; dan
 - d. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Pengembangan Tujuan Pariwisata.
3. Fokus Prioritas Pengembangan Pemasaran dan Promosi Pariwisata, yang didukung oleh kegiatan prioritas:
 1. Peningkatan Promosi Pariwisata Luar Negeri;
 - a. Peningkatan Promosi Pariwisata Dalam Negeri;
 - b. Pengembangan Informasi Pasar Pariwisata;
 - c. Peningkatan Publikasi Pariwisata;
 - d. Peningkatan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi, dan Pameran (*Meeting, Incentive Travel, Conference, and Exhibition/MICE*); dan
 - e. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Pemasaran.
 4. Fokus Prioritas Pengembangan Sumber Daya Pariwisata, yang didukung oleh kegiatan prioritas:
 - a. Pengembangan SDM Kebudayaan dan Pariwisata;
 - b. Penelitian dan Pengembangan Bidang Kepariwisata; dan
 - c. Pengembangan Pendidikan Tinggi Bidang Pariwisata.

3.3.4 Peningkatan Daya Beli Masyarakat.

Upaya meningkatkan daya beli masyarakat ditujukan untuk meningkatkan konsumsi masyarakat sebagai salah satu komponen permintaan domestik yang merupakan sumber utama pertumbuhan ekonomi. Daya beli masyarakat dijaga terutama melalui: (i) menjaga stabilitas harga; (ii) mengadakan berbagai program pemberdayaan masyarakat dan bantuan sosial; (iii) meningkatkan kelancaran arus barang untuk menjaga ketersediaan barang terutama bahan pokok; dan (iv) meningkatkan perdagangan dalam negeri untuk mendorong transaksi perdagangan domestik dan meningkatkan kesempatan berusaha. Penjelasan secara terperinci mengenai upaya menjaga stabilitas harga dapat dilihat pada prioritas bidang stabilitas moneter, sedangkan program pemberdayaan masyarakat dan bantuan sosial dapat dilihat secara lebih terperinci pada Bab I mengenai Pengarusutamaan dan Isu Lintas Bidang.

Upaya untuk menjaga daya beli masyarakat dilakukan melalui kebijakan perdagangan dalam negeri yang diarahkan pada peningkatan penataan sistem distribusi nasional untuk menjamin kelancaran arus barang dan jasa, kepastian usaha, dan daya saing produk domestik.

Strategi yang akan dilakukan dalam perdagangan dalam negeri periode 2010-2014 adalah: (a) meningkatkan integrasi perdagangan antar dan intra wilayah, melalui pengembangan jaringan distribusi perdagangan untuk mendorong kelancaran arus barang sehingga ketersediaan barang dan kestabilan harga dapat terjaga; (b) meningkatkan iklim usaha perdagangan melalui persaingan usaha yang sehat, pengembangan usaha kecil menengah, peningkatan usaha ritel tradisional dan modern, bisnis waralaba, termasuk pengembangan pola kerja sama yang saling menguntungkan antarpelaku usaha; (c) mendorong penciptaan transparansi harga dan pengelolaan risiko harga, yang antara lain melalui optimalisasi pemanfaatan perdagangan berjangka dan pengelolaan sistem informasi harga; (d) meningkatkan penggunaan produk dalam negeri dengan memaksimalkan potensi pasar domestik dan pemanfaatan daya kreasi bangsa; serta (e) memperkuat kelembagaan perdagangan dalam negeri yang mendorong terwujudnya persaingan usaha yang sehat, efektivitas perlindungan konsumen, dan perdagangan berjangka yang efisien.

Berdasarkan strategi dan arah kebijakan pembangunan tersebut, fokus prioritas dan kegiatan prioritas perdagangan dalam negeri dalam lima tahun ke depan adalah:

1. Fokus Prioritas Peningkatan Jaringan Distribusi untuk Menunjang Pengembangan Logistik Nasional, yang didukung oleh kegiatan prioritas sebagai berikut:
 - a. Peningkatan Kelancaran Distribusi Bahan Pokok;
 - b. Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan; dan



- c. Koordinasi Penataan dan Pengembangan Sistem Logistik Nasional.
2. Fokus Prioritas Penguatan Pasar Domestik Dan Efisiensi Pasar Komoditi, yang didukung oleh kegiatan prioritas sebagai berikut:
 - a. Pengembangan Kelembagaan dan Pelaku Usaha Perdagangan;
 - b. Pemberdayaan Dagang Kecil dan Menengah;
 - c. Pengembangan Ekonomi Kreatif;
 - d. Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri;
 - e. Pembinaan dan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi; dan
 - f. Pembinaan dan Pengawasan Pasar Lelang dan Sistem Resi Gudang.
3. Fokus Prioritas Peningkatan Efektivitas Pengawasan dan Iklim Usaha Perdagangan, yang didukung oleh kegiatan prioritas sebagai berikut:
 - a. Penegakan Hukum Persaingan Usaha;
 - b. Pengembangan dan Harmonisasi Kebijakan Persaingan Usaha;
 - c. Pengembangan Kebijakan dan Pemberdayaan Perlindungan Konsumen;
 - d. Penguatan Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional;
 - e. Peningkatan Tertib Ukur; dan
 - f. Peningkatan Efektifitas Pengawasan Barang Beredar dan Jasa.

3.3.5 Keuangan Negara

Berdasarkan masalah dan tantangan yang akan dihadapi bidang keuangan negara pada 2010—2014, strategi dan arah kebijakan yang akan ditempuh adalah mengupayakan terwujudnya optimalisasi pengeluaran pemerintah dengan memperhatikan keberlanjutan APBN yang sehat. Untuk itu, stabilitas ekonomi akan terus dijaga melalui pelaksanaan sinergi kebijakan moneter yang berhati-hati, serta pelaksanaan kebijakan fiskal yang mengarah pada kesinambungan fiskal (*fiscal sustainability*) dengan tetap memberi ruang gerak bagi peningkatan kegiatan ekonomi. Untuk mendukung hal tersebut, reformasi struktural di bidang pengelolaan keuangan negara di antaranya melalui reformasi administrasi dan kebijakan di bidang perpajakan, kepabeanan dan cukai, belanja negara, serta pengelolaan aset pemerintah. Dengan demikian, secara umum kebijakan di bidang keuangan negara diarahkan pada:

1. Penyeimbangan antara peningkatan alokasi anggaran dan upaya untuk memantapkan kesinambungan fiskal melalui: (a) peningkatan penerimaan negara dan efisiensi belanja negara dengan tetap mengupayakan pemberian stimulus fiskal secara terbatas; (b) merumuskan pembiayaan defisit anggaran

sehingga tidak menyebabkan berkurangnya pembiayaan sektor swasta (*crowding out effect*).

2. Peningkatan penerimaan negara terutama ditempuh melalui reformasi kebijakan dan administrasi perpajakan dan kepabeanan, serta optimalisasi PNB, baik dari jenisnya maupun perbaikan administrasinya.
3. Peningkatan efektivitas dan efisiensi pengeluaran negara terutama ditempuh melalui: (a) pemisahan secara jelas kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah yang diikuti dengan pendanaannya berupa belanja daerah, dan kaitannya dengan dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (b) penajaman alokasi anggaran antara lain dengan realokasi belanja negara agar lebih terarah dan tepat sasaran; (c) pengembangan sistem pengadaan barang/jasa pemerintah.
4. Peningkatan pengelolaan pinjaman pemerintah yang diarahkan untuk menurunkan stok pinjaman luar negeri tidak saja relatif terhadap PDB, tetapi juga secara absolut. Sementara itu, untuk pinjaman dalam negeri, diupayakan tetap adanya ruang gerak yang cukup pada sektor swasta. Dengan demikian, rasio stok utang terhadap PDB diperkirakan dapat diturunkan secara bertahap.

Strategi yang akan dilakukan dalam mencapai arah kebijakan tersebut melalui:

1. Penetapan kebijakan belanja yang efektif, dan efisien dengan memperhatikan aspek kemampuan dalam menghimpun pendapatan;
2. Pemantapan pelaksanaan anggaran terpadu (*unified budget*), penerapan sistem penganggaran berbasis kinerja (*performance based budget*), dan penerapan alokasi belanja negara dalam kerangka pengeluaran jangka menengah (*medium term expenditure framework*);
3. Perencanaan dan alokasi anggaran yang tepat sasaran dan adil berdasarkan prioritas program pembangunan;
4. Meningkatkan daya guna dan hasil guna pengelolaan kekayaan negara, dan penilaian kekayaan negara untuk menentukan nilai ekonomi (*existing value*) serta nilai potensi (*potential value*) kekayaan negara;
5. Optimalisasi pendapatan negara dan peningkatan kualitas pelayanan terhadap masyarakat;
6. Pengelolaan pembiayaan dan pengendalian resiko yang optimal.

Untuk mencapai arah kebijakan dan strategi di bidang keuangan negara, prioritas bidang yang terkait dengan pengelolaan keuangan negara terdiri dari: (1) Optimalisasi Pengeluaran Pemerintah Dan Pengelolaan Kekayaan Negara; (2) Pengelolaan APBN Yang Berkelanjutan. Strategi dan arah kebijakan pembangunan tersebut, selanjutnya diturunkan ke dalam fokus prioritas dan kegiatan prioritas optimalisasi pengeluaran pemerintah dan pengelolaan kekayaan negara dalam lima tahun ke depan adalah:



1. Fokus Prioritas Optimalisasi Anggaran Belanja Pemerintah Pusat yang didukung oleh kegiatan prioritas sebagai berikut:
 - a. Pengelolaan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat (ABPP);
 - b. Pengembangan Sistem Penganggaran; dan
 - c. Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Belanja Subsidi dan Belanja Lain-lain (BSBL).
2. Fokus Prioritas Pengelolaan Perimbangan Keuangan yang didukung oleh kegiatan prioritas sebagai berikut:
 - a. Perumusan kebijakan, bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi di bidang pembiayaan dan kapasitas daerah;
 - b. Perumusan kebijakan, bimbingan teknis, dan pengelolaan transfer ke daerah;
 - c. Perumusan kebijakan bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi di bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD); dan
 - d. Perumusan kebijakan, pemantauan dan evaluasi di bidang pendanaan daerah dan ekonomi daerah, penyusunan laporan keuangan transfer ke daerah, serta pengembangan sistem informasi keuangan daerah.
3. Fokus Prioritas Pengelolaan Perbendaharaan Negara yang didukung oleh kegiatan prioritas sebagai berikut:
 - a. Pembinaan pelaksanaan anggaran dan pengesahan dokumen pelaksanaan anggaran
 - b. Peningkatan pengelolaan kas negara;
 - c. Manajemen investasi dan penerusan pinjaman;
 - d. Penyelenggaraan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran; dan
 - e. Penyusunan kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah.
4. Fokus Prioritas Pengelolaan Kekayaan Negara yang didukung oleh kegiatan prioritas sebagai berikut:
 - a. Perumusan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis, evaluasi dan pengelolaan barang milik negara;
 - b. Perumusan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis, evaluasi dan pengelolaan Barang Milik Negara dan Kekayaan Negara yang dipisahkan;
 - c. Perumusan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis, evaluasi dan pengelolaan Kekayaan Negara lain-lain.

Sementara itu, prioritas pengelolaan APBN yang berkelanjutan melalui fokus

prioritas dan kegiatan prioritas yang dapat diuraikan sebagai berikut.

1. Fokus Prioritas Perumusan Kebijakan Fiskal, Pengelolaan Pembiayaan Anggaran Dan Pengendalian Resiko yang didukung oleh kegiatan prioritas sebagai berikut:
 - a. Perumusan Kebijakan APBN;
 - b. Pengelolaan Risiko Fiskal dan Sektor Keuangan;
 - c. Perumusan Kebijakan Ekonomi;
 - d. Perumusan Kebijakan Pajak, Kepabeanan, Cukai dan PNBPN;
 - e. Penyusunan Rancangan APBN;
 - f. Pengelolaan Pinjaman;
 - g. Pengelolaan Surat Utang Negara;
 - h. Pengelolaan Pembiayaan Syariah;
 - i. Pengelolaan Strategi dan Portofolio Utang; dan
 - j. Pelaksanaan Evaluasi, Akuntansi, dan Setelmen Utang.
2. Fokus Prioritas Peningkatan dan Optimalisasi Penerimaan Negara yang didukung oleh kegiatan prioritas sebagai berikut:
 - a. Pengelolaan PNBPN dan Subsidi;
 - b. Peningkatan Efektivitas Pemeriksaan, Optimalisasi Pelaksanaan Penagihan;
 - c. Perumusan Kebijakan di Bidang PPN, PBB, BPHTB, KUP, PPSP, dan Bea Materai;
 - d. Perumusan Kebijakan di Bidang PPh dan Perjanjian Kerjasama Perpajakan Internasional;
 - e. Peningkatan Kualitas Pelayanan serta Efektivitas Penyuluhan dan Kehumasan;
 - f. Perencanaan, Pengembangan, dan Evaluasi di Bidang Teknologi, Komunikasi, dan Informasi;
 - g. Pelaksanaan reformasi proses bisnis;
 - h. Pengelolaan data dan dokumen Perpajakan;
 - i. Perumusan Kebijakan dan Peningkatan Pengelolaan Penerimaan Bea dan Cukai;
 - j. Perumusan Kebijakan dan Bimbingan Teknis Bidang Kepabeanan;



- k. Pelaksanaan Pengawasan dan Penindakan atas Pelanggaran Peraturan Perundangan, Intelijen dan Penyidikan Tindak Pidana Kepabeanaan dan cukai.
3. Fokus Prioritas Pengelolaan dan Pembinaan BUMN yang didukung oleh kegiatan prioritas sebagai berikut:
- a. Dukungan pelaksanaan program prioritas Pemerintah bidang energi (Prioritas Nasional)
 - b. Restrukturisasi BUMN besar / penting / strategis (Prioritas Nasional)
 - c. Penyusunan best practice GCG
 - d. Penetapan sistem remunerasi berbasis kinerja di BUMN
 - e. Penyusunan peraturan mengenai penilaian kinerja di BUMN yang mangacu pada standar internasional
 - f. Kajian, evaluasi dan monitoring pendayagunaan aset BUMN
 - g. Penetapan target, monitoring, dan evaluasi kinerja BUMN
 - h. Penetapan peraturan pelaksanaan pemisahan administrasi keuangan PSO dan Perpres tentang SOP pelaksanaan PSO
 - i. Penyusunan peraturan perundangan yang mengarah pada perwujudan pengelolaan BUMN berbasis mekanisme korporasi murni
 - j. Kajian BUMN rugi dan bermasalah
 - k. Penyusunan dan pelaksanaan Program Tahunan Privatisasi
 - l. Kajian rightsizing BUMN
 - m. Uji kepatutan dan kelayakan calon Direksi dan Dewan Komisaris
 - n. Dukungan pelaksanaan program prioritas Pemerintah bidang ketahanan pangan
 - o. Dukungan pelaksanaan program prioritas Pemerintah bidang infrastruktur

3.3.6 Stabilitas Moneter

Secara umum kebijakan moneter selama kurun waktu 2010–2014 diarahkan untuk memelihara stabilitas harga dalam negeri dan nilai tukar rupiah melalui koordinasi, penyelarasan dan sinergi kebijakan moneter dan fiskal, sektor keuangan, serta sektor riil untuk menciptakan pengelolaan ekonomi secara sehat dan berkelanjutan. Adapun strategi yang akan ditempuh adalah sebagai berikut:

1. meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan fiskal dan moneter serta kebijakan terkait lainnya dalam rangka pengendalian inflasi sesuai dengan

sasaran yang ditentukan (*inflation targetting*) serta dalam penyusunan kerangka makro ekonomi dan pengembangan pasar keuangan;

2. stabilisasi harga dan pengamanan produksi/pasokan dan distribusi barang/jasa, terutama bahan makanan pokok yang harganya mudah bergejolak, baik di perkotaan maupun di perdesaan;
3. mendorong keterlibatan seluruh pemangku kepentingan, baik di pusat (Kementerian/Lembaga terkait serta asosiasi produsen/ pedagang dan asosiasi konsumen) maupun di daerah (provinsi dan kabupaten/kota) dalam pemantauan, evaluasi, dan pengendalian perkembangan harga bahan pokok secara intensif;
4. mengembangkan dan menerapkan kebijakan-kebijakan yang terkoordinasi untuk mengatasi masalah struktural, seperti percepatan pembangunan infrastruktur serta reformasi regulasi/kebijakan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi, baik di pusat (Kementerian/Lembaga) maupun daerah (provinsi dan kabupaten/kota);
5. meningkatkan kualitas kelembagaan termasuk pola pikir dunia usaha dan masyarakat bahwa kenaikan harga yang rendah dan wajar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi tingkat kemiskinan;
6. meningkatkan fungsi *check and balance* dalam masyarakat untuk mengendalikan inflasi antara lain melalui peningkatan peran lembaga konsumen, lembaga-lembaga survei pemantau harga untuk ikut memantau perkembangan harga di daerah sehingga kenaikan harga selanjutnya dapat cepat diantisipasi.

Berdasarkan strategi dan arah kebijakan dalam rangka mengendalikan dan memperkokoh stabilitas moneter di atas, fokus prioritas yang akan ditempuh adalah peningkatan stabilitas rupiah dan nilai tukar.

3.3.7 Stabilitas Sektor Keuangan

Berdasarkan perkembangan terkini dan permasalahan yang dihadapi oleh sektor keuangan, arah pengembangan sektor keuangan dalam periode 2010—2014 adalah peningkatan daya saing dan ketahanan sektor keuangan bagi pembiayaan pembangunan nasional. Guna mencapai arah pembangunan tersebut di atas, maka strategi yang ditempuh adalah peningkatan ketahanan sektor keuangan melalui sistem keuangan yang sehat, mantap, dan efisien serta percepatan fungsi intermediasi dan penyaluran dana masyarakat termasuk peningkatan akses kepada lembaga jasa keuangan, kepada masyarakat miskin dalam rangka membangun sektor keuangan yang inklusif (*financial sector inclusion*) untuk mendukung pembangunan.

Strategi peningkatan ketahanan sektor keuangan melalui sistem keuangan yang sehat, mantap serta efisien difokuskan pada hal-hal berikut:



1. Menjaga stabilitas ekonomi melalui pencegahan risiko sistemik pada sektor keuangan melalui kegiatan:
 - a. memantapkan koordinasi kebijakan fiskal dan moneter;
 - b. mengimplementasikan konsep jaring pengaman sistem Keuangan;
 - c. meningkatkan koordinasi nasional dan kerja sama internasional dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan teroris melalui industri keuangan.
2. Memantapkan kinerja dan stabilitas industri jasa keuangan melalui kegiatan:
 - a. menerapkan pengaturan dan pengawasan industri jasa keuangan dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kredibilitas otoritas regulasi dan pengawasan jasa keuangan;
 - b. melakukan menguatkan kualitas manajemen dan operasional lembaga jasa keuangan;
 - c. meningkatkan upaya perlindungan bagi konsumen/investor lembaga jasa keuangan.

Strategi percepatan fungsi intermediasi dan penyaluran dana masyarakat termasuk peningkatan akses kepada lembaga jasa keuangan (LJK) kepada masyarakat miskin melalui hal-hal berikut:

1. mengembangkan produk perbankan dan pasar modal syariah;
2. melaksanakan diversifikasi sumber pendanaan pembangunan melalui lembaga keuangan bukan bank (LKBB);
3. memperluas cakupan pelayanan lembaga jasa keuangan terutama untuk sektor usaha mikro, kecil dan menengah;
4. mengembangkan infrastruktur pendukung lembaga jasa keuangan.

Berdasarkan strategi dan arah kebijakan dalam rangka memelihara dan meningkatkan stabilitas sektor keuangan tersebut, fokus prioritas yang akan diupayakan adalah peningkatan ketahanan dan daya saing sektor keuangan.

3.3.8 Revitalisasi Industri

Dalam RPJPN 2005—2025 disebutkan bahwa struktur perekonomian diperkuat dengan mendudukkan sektor industri sebagai motor penggerak yang didukung oleh kegiatan pertanian dalam arti luas, kelautan, dan pertambangan yang menghasilkan produk-produk secara efisien, modern, dan berkelanjutan serta jasa-jasa pelayanan yang efektif yang menerapkan praktik terbaik dan ketatakelolaan yang baik agar terwujud ketahanan ekonomi yang tangguh.

Pembangunan industri diarahkan untuk mewujudkan industri yang berdaya

saing dengan struktur industri yang sehat dan berkeadilan, yaitu sebagai berikut:

1. Dalam hal penguasaan usaha, struktur industri disehatkan dengan meniadakan praktek-praktek monopoli dan berbagai distorsi pasar.
2. Dalam hal skala usaha, struktur industri akan dikuatkan dengan menjadikan IKM sebagai basis industri nasional, yaitu terintegrasi dalam mata rantai pertambahan nilai dengan industri berskala besar.
3. Dalam hal hulu-hilir, struktur industri akan diperdalam dengan mendorong diversifikasi ke hulu dan ke hilir membentuk rumpun industri yang sehat dan kuat.

Melalui Peraturan Presiden nomor 28 Tahun 2008, pemerintah telah menetapkan Kebijakan Industri Nasional (*National Industrial Policy*). Klaster Industri Prioritas dalam kebijakan Industri Nasional adalah sebagai berikut:

1. Industri Agro: 1) industri kelapa sawit; 2) industri karet dan barang karet; 3) industri kakao dan coklat; 4) industri kelapa; 5) industri kopi; 6) industri gula; 7) industri tembakau; 8) industri buah-buahan; 9) industri kayu dan barang kayu; 10) industri hasil perikanan dan laut; 11) industri pulp dan kertas; 12) industri pengolahan susu;
2. Industri Alat Angkut: 1) industri kendaraan bermotor; 2) industri perkapalan; 3) industri kedirgantaraan; 4) industri perkeretaapian;
3. Industri Elektronika dan Telematika: 1) industri elektronika; 2) industri perangkat keras telekomunikasi dan pendukungnya; 3) industri perangkat penyiaran dan pendukungnya; 4) industri komputer dan peralatannya;
4. Basis Industri Manufaktur:
 - a. industri material dasar: 1) industri besi dan baja; 2) industri semen; 3) industri petrokimia; 4) industri keramik
 - b. industri permesinan: 1) industri peralatan listrik dan mesin listrik; 2) industri mesin dan peralatan umum
 - c. industri manufaktur padat tenaga kerja: 1) industri tekstil dan produk tekstil; 2) industri alas kaki; 3) industri farmasi dengan bahan baku dalam negeri
5. Industri Penunjang Industri Kreatif dan Kreatif Tertentu: 1) industri perangkat lunak dan konten multimedia; 2) industri fashion; 3) industri kerajinan dan barang seni;
6. Industri Kecil dan Menengah Tertentu: 1) industri batu mulia dan perhiasan; 2) industri garam rakyat; 3) industri gerabah dan keramik hias; 4) industri minyak atsiri; 5) industri makanan ringan.



Berdasarkan strategi dan arah kebijakan pembangunan di atas, fokus prioritas pembangunan industri dalam RPJMN 2010—2014 difokuskan pada tiga hal sebagai berikut:

1. Fokus Prioritas Penumbuhan Populasi Usaha Industri dengan hasil peningkatan jumlah populasi usaha industri dengan postur yang lebih sehat yang didukung oleh kegiatan prioritas sebagai berikut:
 - a. Revitalisasi industri, khususnya industri pupuk, industri gula, dan revitalisasi berbagai gugus (cluster) industri prioritas sesuai dengan Kebijakan Industri Nasional.
 - b. Penumbuhan gugus (cluster) industri berbasis minyak sawit (oleochemical) serta gugus (cluster) industri berbasis kondensat minyak dan gas bumi.
 - c. Pengembangan kawasan industri khususnya yang berada dalam kawasan ekonomi khusus (KEK).
2. Fokus prioritas Penguatan Struktur Industri dengan hasil yang diharapkan adalah semakin terintegrasinya IKM dalam gugus (cluster) industri, tumbuh dan berkembangnya gugus (cluster) industri demi penguatan daya saing di pasar global. Yang didukung oleh kegiatan prioritas sebagai berikut:
 - a. Pembinaan industri agar semakin mampu bersaing menjadi pemasok bagi industri yang lebih besar dan/atau industri hilirnya;
 - b. Pengembangan standardisasi industri dan manajemen guna mempermudah transaksi antarusaha industri.
3. Fokus prioritas Peningkatan Produktivitas Usaha Industri dengan hasil yang diharapkan dari pelaksanaan fokus ini adalah meningkatnya nilai tambah produk melalui penerapan iptek. Yang didukung oleh kegiatan prioritas:
 - a. kegiatan yang tercakup dalam program penumbuhan industri unggulan berbasis iptek, terutama untuk industri alat angkut, elektronika, dan telematika.

3.3.9 Daya Saing Ketenagakerjaan

Tantangan dalam meningkatkan daya saing ketenagakerjaan semakin berat. Untuk itu, pembangunan ketenagakerjaan dalam periode 2010-2014 diarahkan untuk:

1. Mendorong terciptanya kesempatan kerja yang baik (*decent work*), yaitu lapangan kerja produktif serta adanya perlindungan dan jaminan sosial yang memadai;

2. Mendorong terciptanya kesempatan kerja seluas-luasnya dan merata dalam sektor-sektor pembangunan;
3. Meningkatkan kondisi dan mekanisme Hubungan Industrial untuk mendorong kesempatan kerja;
4. Menyempurnakan peraturan-peraturan ketenagakerjaan dan melaksanakan peraturan ketenagakerjaan pokok (utama), sesuai hukum internasional;
5. Mengembangkan jaminan sosial dan pemberdayaan pekerja;
6. Meningkatkan kompetensi tenaga kerja dan produktivitas;
7. Menciptakan kesempatan kerja melalui program-program pemerintah;
8. Menyempurnakan kebijakan migrasi dan pembangunan;
9. Mengembangkan kebijakan pendukung pasar kerja melalui informasi pasar kerja.

Sejalan dengan arah kebijakan tersebut, strategi pembangunan yang akan dilaksanakan adalah:

1. Memperbaiki tempat kerja (sisi *demand*), antara lain dengan: (a) Mendorong tumbuhnya investasi, khususnya investasi padat pekerja agar tercipta kesempatan kerja; (b) Mengurangi hambatan-hambatan dalam pasar kerja, dengan mempermudah seseorang untuk memperoleh pekerjaan; dan (c) Merealisasikan kebijakan pasar kerja yang mampu beradaptasi dengan suatu perubahan tanpa menimbulkan gejolak dalam pasar kerja.
2. Memperlancar berjalannya pasar kerja (sisi *supply*), antara lain dengan: (a) Memberikan kemudahan memperoleh tingkat keterampilan dan kualitas yang lebih baik, dan (b) Memperoleh akses terhadap informasi pekerjaan dan lowongan kerja.

Berdasarkan strategi dan arah kebijakan ketenagakerjaan tersebut, maka fokus prioritas dan kegiatan prioritas untuk meningkatkan daya saing ketenagakerjaan adalah sebagai berikut.

3. Fokus Prioritas Peningkatan Kualitas dan Pengembangan Kompetensi Tenaga Kerja, yang didukung oleh kegiatan:
 - a. menyusun standar baku agar suatu lembaga pelatihan memenuhi kriteria sebagai lembaga pelatihan berbasis kompetensi;
 - b. mengembangkan pedoman dan prosedur pengembangan sertifikasi kompetensi;
 - c. menyusun panduan tata pengelolaan dan pengembangan manajemen lembaga pelatihan yang baik, termasuk *pilot project* pelaksanaannya;

- d. menyempurnakan peraturan atau aturan main lembaga yang berfungsi dalam melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja;
 - e. melaksanakan harmonisasi regulasi standardisasi dan kompetensi tenaga kerja, serta kerangka kualifikasi nasional bidang pendidikan dan pelatihan;
 - f. menyempurnakan pelaksanaan uji kompetensi termasuk pengembangan materi dan tempat uji kompetensi; dan
 - g. meningkatkan jumlah dan kapasitas asesor kompetensi dan akreditasi.
4. Fokus Prioritas Perbaikan Iklim Ketenagakerjaan dan Penguatan Hubungan Industrial
- a. Memperbaiki Sistem dan Mekanisme Hubungan Industrial:
 - (a) memperkuat perundingan bersama;
 - (b) meningkatkan kemampuan teknik bernegosiasi; dan
 - (c) mendorong penyelesaian bipartit.
 - b. Penyempurnaan Peraturan Ketenagakerjaan:
 - (a) sistem pengupahan dan penetapan upah minimum;
 - (b) pengaturan dan kebijakan perjanjian kerja waktu tertentu;
 - (c) kebijakan *outsourcing*;
 - (d) kebijakan PHK dan uang pesangon;
 - (e) pengidentifikasian kerangka hubungan industrial; dan
 - (f) perbaikan prosedur penyelesaian perselisihan.
 - c. Pelaksanaan Peraturan Ketenagakerjaan Utama dan Penegakkan Hukum
 - (a) menelaah peraturan-peraturan ketenagakerjaan yang belum mendorong ke arah kerja sama antara pengawas ketenagakerjaan dan Tripartit;
 - (b) membuat aturan main sistem pengawasan ketenagakerjaan di industri,
 - (c) menyusun peta industri menengah dan besar untuk memprioritaskan sektor/sub sektor/jenis industri yang memerlukan perhatian.
 - d. Peningkatan Jaminan Sosial Pekerja
 - (a) mengidentifikasi kebutuhan jaminan social pada berbagai kelompok pekerja;
 - (b) menentukan risiko sosial pekerja;
 - (c) menyusun program jaminan berdasarkan risiko, pendapatan, dan kebutuhan;
 - (d) identifikasi kesediaan dan kemampuan membayar iuran per pekerja serta membangun mekanisme pendukungnya,
 - (e) mengumpulkan dan mengasuransikan kembali untuk meningkatkan keberlanjutan dan peranan sektor swasta.

5. Fokus Prioritas Peningkatan Fasilitas dan Perlindungan untuk Mendukung Mobilitas Tenaga Kerja
 - a. Peningkatan Peran Daerah dalam Fasilitas dan Perlindungan Pekerja
 - (a) Pemerintah daerah harus menghilangkan berbagai pungutan dan retribusi atas perpindahan dan perjalanan penduduk untuk melakukan kegiatan ekonomi kesuatu daerah khususnya dalam mencari pekerjaan;
 - (b) Mengembangkan informasi pasar kerja akan bermanfaat bagi pekerja.
 - b. Menyempurnakan regulasi dan Memperkuat Kelembagaan Penyelenggaraan Penempatan Calon Pekerja Migran
 - (a) menyempurnakan dan memperbaiki Kebijakan Asuransi Pekerja Migran dengan menciptakan transparansi prosedur pemilihan perusahaan;
 - (b) memfasilitasi akses untuk memperoleh kredit perbankan melalui kerja sama antara perbankan dengan pengguna jasa pekerja;
 - (c) menyempurnakan Pengiriman Remitansi Tenaga Kerja, antara lain dengan menjalin kerja sama dengan lembaga-lembaga keuangan, memfasilitasi peningkatan kesepakatan kerja sama perbankan dengan perbankan negara penempatan;
 - (d) menyempurnakan Peraturan Perlindungan Pekerja, antara lain dengan meratifikasi konvensi buruh migran dan keluarganya yang sudah ditandatangani perjanjiannya pada tahun 2004, dan menyempurnakan UU No. 39 Tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan tenaga kerja ke luar negeri, dengan penekanan aspek perlindungan;
 - (e) meningkatkan peran dalam perkembangan tugas “*networking* dan *market intelligent*” Perwakilan di luar negeri;
 - (f) membagi secara jelas kewenangan masing-masing penyelenggara penempatan, baik antara kementerian/lembaga, antara pemerintah dan para penyelenggara penempatan, dan antara pemerintah pusat dan daerah.
 - c. Meningkatkan Pelayanan Penyelenggaraan Penempatan
 - (a) Melakukan perbaikan pelaksanaan penempatan, dengan mereview, pembenahan, meningkatkan koordinasi mulai penyusunan informasi peluang pasar, diseminasi, penyiapan program rekrutmen, penerapan kriteria/persyaratan yang diperlukan, penyiapan pendidikan dan pelatihan, serta menyempurnakan materi pembekalan akhir penempatan;
 - (b) Memperbaiki sistem dan mekanisme pelayanan termasuk menyempurnakan mekanisme sejak rekrutmen hingga keberangkatan;



- (c) Meningkatkan keterlibatan pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan dan melakukan pendampingan selama proses pelaksanaan rekrutmen dan pendidikan/pelatihan.
- d. Meningkatkan Perlindungan Pekerja Migran.
 - (a) Pemberian dan akses kepada bantuan hukum, dengan penyelesaian masalah hukum yang menimpa pekerja;
 - (b) Penindakan tegas terhadap tindakan percaloan yang dilakukan oleh oknum dalam proses pemberangkatan pekerja ke luar negeri;
 - (c) Pengurusutamaan prinsip HAM dalam Penyusunan Kebijakan dan Pendidikan terhadap Pekerja;
 - (d) Pemberian akses dalam rangka peningkatan perlindungan, dengan (a) membangun *hotline service* dalam bentuk kotak surat/kotak pos; (b) mempercepat pembangunan rumah singgah (*shelter*) di KBRI untuk pekerja migran bermasalah; dan (c) menyusun suatu prosedur untuk pemulihan kondisi pekerja migran yang memperoleh perlakuan kekerasan fisik, mental, termasuk pelayanan penyakit menular seksual.
- e. Mengembangkan Informasi Pasar Kerja Luar Negeri; Mengembangkan sistem informasi secara terpadu yang dapat memberikan informasi pekerja migran secara efektif, efisien, terjaga keamanannya, akurat, dan andal.

3.3.10 Pemberdayaan Koperasi dan UMKM

Dalam periode lima tahun mendatang, strategi pemberdayaan koperasi dan UMKM diarahkan kepada pembangunan kompetensi inovasi dan teknologi sehingga dapat lebih berperan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan serta dapat meningkatkan posisi tawar dan efisiensi usaha secara lebih terstruktur dan terlembaga melalui perkoperasian. Untuk itu, perlu diperbaiki lingkungan usaha agar kondusif bagi peningkatan daya saing koperasi dan UMKM, yang seiring dengan itu perlu juga dilakukan peningkatan akses usaha kelompok kepada sumber daya produktif, serta ditingkatkan juga kapasitas, kompetensi, dan produktivitas usaha.

Sejalan dengan strategi tersebut dan dengan mempertimbangkan kondisi baik internal maupun eksternal ke depan, arah kebijakan prioritas bidang pemberdayaan koperasi dan UMKM akan ditempuh dalam periode lima tahun mendatang melalui empat fokus prioritas sebagai berikut.

1. Peningkatan iklim usaha yang kondusif bagi koperasi dan UMKM

Fokus prioritas peningkatan iklim usaha yang kondusif bagi koperasi dan UMKM diarahkan untuk mewujudkan pemberdayaan koperasi dan UMKM yang lebih koordinatif dan partisipatif, yang didukung peningkatan peran lembaga-lembaga swasta dan masyarakat; menyediakan regulasi/kebijakan nasional dan daerah

yang mendukung pemberdayaan koperasi dan UMKM; serta menurunkan pungutan yang menghambat perkembangan usaha koperasi. Adapun kegiatan prioritasnya mencakup:

- a. penataan peraturan perundang-undangan terkait dengan perkoperasian, LKM, pendaftaran dan perizinan usaha, lokasi usaha, penggunaan produksi dalam negeri, dan penyebarluasan teknologi tepat guna, beserta ketentuan pelaksanaannya;
 - b. peninjauan dan penghapusan berbagai pungutan dan regulasi yang merugikan koperasi dan UMKM, baik yang sektoral maupun spesifik daerah;
 - c. pembentukan forum koordinasi pemberdayaan koperasi dan UMKM; serta
 - d. koordinasi Penataan Kelembagaan Pengembangan UKM Berbasis Inovasi.
2. Pengembangan produk dan pemasaran bagi koperasi dan UMKM

Fokus prioritas pengembangan produk dan pemasaran bagi koperasi dan UMKM diarahkan untuk mengembangkan produk koperasi dan UMKM yang berkualitas, inovatif dan kreatif untuk bersaing di pasar domestik dan mancanegara. Adapun kegiatan prioritasnya meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. penyediaan sistem insentif dan pembinaan bagi UMKM yang berbasis inovasi dan berorientasi ekspor;
 - b. pengembangan dan penguatan sentra-sentra produksi/gugus (cluster) usaha skala mikro dan kecil, terutama di daerah tertinggal dan terisolir;
 - c. dukungan pengembangan kemitraan yang melibatkan koperasi dan UMKM dalam pengembangan produk-produk unggulan yang berbasis rantai nilai, subkontrak, alih teknologi, pemasaran/ekspor, atau investasi;
 - d. dukungan pemasaran produk dan jasa koperasi dan UMKM melalui pengembangan dan penguatan kelembagaan, informasi pasar dan jaringan pemasaran baik domestik maupun ekspor; serta
 - e. dukungan sistem insentif bagi penyedia jasa pendampingan dan konsultasi keuangan yang mendukung peningkatan akses koperasi dan UMKM kepada sumber pembiayaan.
3. Peningkatan daya saing SDM koperasi dan UMKM

Fokus Prioritas Peningkatan Daya Saing SDM Koperasi dan UMKM diarahkan untuk meningkatkan kapasitas dan produktivitas koperasi dan UMKM, yang didukung pengusaha, pengelola dan pekerja yang memiliki kewirausahaan dan kompetensi yang tinggi; dan meningkatkan jumlah wirausaha baru yang didukung pola pengembangan kewirausahaan yang tersistem. Adapun prioritas kegiatannya mencakup:

- a. penyusunan *blueprint* pengembangan kewirausahaan nasional yang didukung pembenahan pranata kelembagaan;
 - b. peningkatan kompetensi pengusaha skala mikro, kecil, dan menengah serta pengelola koperasi;
 - c. revitalisasi dan pengembangan lembaga pendidikan dan pelatihan koperasi dan UMKM; serta
 - d. dukungan pengembangan wirausaha baru melalui inkubator teknologi dan bisnis, serta pola-pola pengembangan lain sesuai dengan *blueprint* pengembangan kewirausahaan.
4. Penguatan kelembagaan koperasi

Fokus Prioritas Penguatan Kelembagaan Koperasi diarahkan untuk mengembangkan praktik berkoperasi yang sesuai prinsip dan asas koperasi; serta meningkatkan peran koperasi dalam memfasilitasi perkembangan usaha anggota dan peningkatan kesejahteraan anggota. Adapun kegiatan prioritasnya meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. penyuluhan perkoperasian kepada masyarakat luas yang disertai dengan pemasyarakatan contoh-contoh koperasi sukses yang dikelola sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip koperasi yang baik;
- b. peningkatan kemampuan pembina koperasi;
- c. peningkatan kualitas administrasi dan pengawasan pemberian badan hukum koperasi;
- d. penyediaan insentif dan fasilitasi dalam rangka pengembangan usaha dan jaringan kerja sama usaha antarkoperasi, termasuk pengembangan koperasi sekunder; serta
- e. peningkatan kapasitas kelembagaan koperasi di bidang pendidikan dan pelatihan, penyuluhan, keuangan pembiayaan, produksi, penerapan teknologi, dan pemasaran, organisasi, manajemen, partisipasi dan promosi anggota dan pengendalian dan akuntabilitas dalam rangka melayani kebutuhan pengembangan usaha.

3.3.11 Jaminan Sosial

Dalam pelaksanaan pembangunan bidang jaminan sosial lima tahun ke depan, ditetapkan strategi dan arah kebijakan dalam mencapai pelaksanaan program dan kegiatan jaminan sosial yang semakin baik. Strategi dan arah kebijakan pembangunan di bidang jaminan sosial adalah sebagai berikut:

1. Penataan peraturan perundang-undangan yang tersedia dan yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan sistem jaminan sosial yang integratif, komprehensif, efektif, dan efisien;
2. Peningkatan upaya sosialisasi dan pemahaman menyeluruh mengenai jaminan sosial berbasis asuransi terhadap seluruh masyarakat;
3. Peningkatan dan pengintegrasian peran sektor swasta dalam menunjang penyelenggaraan sistem jaminan sosial; peran swasta diperlukan sebagai pendukung dalam menyediakan jaminan sosial bagi masyarakat yang belum tercakup saat ini;
4. Penyelenggaraan sistem jaminan sosial harus menggunakan analisis aktuaria sebagai prasyarat dalam keberlanjutan (*sustainability*) pelaksanaannya dan agar tidak menimbulkan beban di masa depan; pengelolaan dana jaminan sosial juga harus dilakukan secara hati-hati (*prudent*);
5. Pemberian intervensi berupa subsidi iuran jaminan sosial bagi masyarakat miskin untuk mencakup sebagian besar atau seluruh kelompok masyarakat miskin dan rentan dalam skema jaminan sosial; sesuai dengan UU No.40 tahun 2004, prioritas utama yang harus dilakukan adalah asuransi kesehatan yang mencakup seluruh masyarakat.

Untuk itu pelaksanaan program jaminan sosial pada tahun 2010—2014 diarahkan pada beberapa hal yang menjadi Fokus Prioritas Penataan Kelembagaan Jaminan Sosial. Fokus prioritas ini mencakup antara lain proses peralihan dan pemberian dasar hukum BPJS, penyusunan peraturan pelaksanaan, dan harmonisasi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan implementasi SJSN. Fokus tersebut akan diwakili oleh berbagai langkah yang harus dilaksanakan dalam jangka menengah (2010—2014), di antaranya adalah sebagai berikut:

1. penyusunan, penerbitan, dan penataan berbagai regulasi atau peraturan sebagai dasar hukum serta petunjuk teknis pelaksanaan program jaminan sosial;
2. penataan kelembagaan pelaksana jaminan sosial;
3. peningkatan peran serta pemangku kepentingan yang terkait dalam pelaksanaan SJSN;
4. peningkatan jumlah sasaran untuk program jaminan sosial yang sudah ada terutama diarahkan pada pekerja sektor informal yang selama ini belum terjangkau;
5. penyediaan skema pengelolaan yang berlandaskan analisis aktuaria dan manajemen keuangan yang berhati-hati dan berkesinambungan dalam penyelenggaraan jaminan sosial.

RENCANA TINDAK PRIORITAS BIDANG PEREKONOMIAN

BIDANG PEMBANGUNAN : PEREKONOMIAN

PRIORITAS : Peningkatan Investasi

NO	FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil <i>outcomes/output</i> yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010 - 2014 (Rp. Miliar)
				2010	2014			
1.	FOKUS : Peningkatan harmonisasi kebijakan dan penyederhanaan perijinan investasi	<i>Starting a business</i>	Jumlah hari untuk proses perijinan	60 hari			BKPM	253,1
a.	Peningkatan Deregulasi Kebijakan Penanaman Modal	Merealisasikan kegiatan kajian analisis kebijakan dan kegiatan sosialisasi kebijakan yang berorientasi pada peningkatan daya saing	1. Jumlah rumusan untuk rekomendasi bahan penyusunan kebijakan penanaman modal	1 rekomendasi	5 rekomendasi ^{K)}	PROGRAM PENINGKATAN DAYA SAING PENANAMAN MODAL	BKPM	92,3
			2. Jumlah rumusan kebijakan sebagai masukan bagi penyempurnaan kebijakan dan pengembangan penanaman modal yang berdaya saing	1 rumusan	5 rumusan ^{K)}			

BIDANG PEMBANGUNAN : PEREKONOMIAN

PRIORITAS : Peningkatan Investasi

NO	FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil <i>outcomes/output</i> yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010 - 2014 (Rp. Miliar)
				2010	2014			
			3. Jumlah kegiatan dan peserta sosialisasi kebijakan penanaman modal	55 kegiatan (15 sosialisasi di dalam negeri, 5 sosialisasi di luar negeri, 20 fasilitasi di dalam negeri, 15 fasilitasi di luar negeri)	55 kegiatan (15 sosialisasi di dalam negeri, 5 sosialisasi di luar negeri, 20 fasilitasi di dalam negeri, 15 fasilitasi di luar negeri)			
b.	Pengembangan Potensi Penanaman Modal Daerah (prioritas bidang)	Merealisasikan kegiatan identifikasi pemetaan dan pengembangan potensi yang diarahkan bagi peningkatan penanaman modal di daerah	1. Jumlah Informasi data potensi daerah yang mutakhir yang didokumentasikan secara elektronik. 2. Jumlah kegiatan dan peserta workshop pengembangan potensi daerah dan sosialisasi Sistem Informasi Potensi Investasi Daerah (SIPID) 3. Jumlah hasil kajian dan pemetaan tentang potensi daerah serta pengembangan potensi wilayah investasi dan pengembangan industri.	33 Prop <i>Workshop</i> :4 daerah 400 psrta Sosialisasi: 5 daerah 250 org	33 Prop <i>Workshop</i> : 6 daerah 600 psrta Sosialisasi:5 daerah 500 org	PROGRAM PENINGKATAN DAYA SAING PENANAMAN MODAL	BKPM	37,1

BIDANG PEMBANGUNAN : PEREKONOMIAN

PRIORITAS : Peningkatan Investasi

NO	FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil <i>outcomes/output</i> yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010 - 2014 (Rp. Miliar)
				2010	2014			
				10 peta potensi daerah (mendalam) dan 23 peta potensi daerah secara umum	10 peta potensi daerah (mendalam) dan 23 peta potensi daerah secara umum			
c.	Pemberdayaan Usaha Nasional (prioritas bidang)	Merealisasikan kegiatan fasilitasi kemitraan usaha bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dalam	1. Jumlah pelaksanaan Forum Komunikasi Pemberdayaan Usaha Nasional. 2. Jumlah pelaksanaan <i>Matchmaking</i> Dalam dan Luar Negeri. 3. Jumlah pelaksanaan Pelatihan Peningkatan Kemampuan Kewirausahaan UMKMK. 4. Jumlah hasil Kajian Peningkatan Partisipasi UMKM.	5 Lokasi 4 Lokasi 5 Negara 5 Lokasi 1 Set	4 Lokasi 4 Lokasi 4 Negara 6 Lokasi 5 set ^{K)}	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR BKPM	BKPM	39,4

BIDANG PEMBANGUNAN : PEREKONOMIAN

PRIORITAS : Peningkatan Investasi

NO	FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil <i>outcomes/output</i> yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010 - 2014 (Rp. Miliar)
				2010	2014			
d.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Persetujuan Penanaman Modal (prioritas bidang)	Meningkatnya kualitas pelayanan penerbitan surat persetujuan penanaman modal	1. Jumlah persetujuan yang dapat diproses dalam satu satuan waktu tertentu.	100%	100%	PROGRAM PENINGKATAN DAYA SAING PENANAMAN MODAL	BKPM	25,4
			2. Jumlah partisipasi instansi sektoral dan daerah dalam pelaksanaan sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).	100%	100%			
			3. Jumlah kegiatan sinkronisasi dan harmonisasi tentang tata cara pelayanan penerbitan surat persetujuan penanaman modal bagi aparatur pemerintah propinsi dan kabupaten atau kota serta dunia usaha	100%	100%			
			4. Jumlah pedoman penilaian permohonan penanaman modal	1 (satu) buah buku pedoman	5 (lima) buah ^{K)} buku pedoman			
			5. Jumlah penyelenggaraan peningkatan kapasitas teknis bagi aparatur pelaksana pelayanan penanaman modal	90%	90%			

BIDANG PEMBANGUNAN : PEREKONOMIAN

PRIORITAS : Peningkatan Investasi

NO	FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil <i>outcomes/output</i> yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010 - 2014 (Rp. Miliar)
				2010	2014			
e.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Perijinan Penanaman Modal (prioritas bidang)	Meningkatnya kapasitas pelayanan perijinan penanaman modal	1. Jumlah perijinan yang dapat diproses dalam satu satuan waktu tertentu.	100%	100%	PROGRAM PENINGKATAN DAYA SAING PENANAMAN MODAL	BKPM	19,3
			2. Jumlah partisipasi instansi sektoral dan daerah dalam pelaksanaan sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).	100%	100%			
			3. Jumlah kegiatan sinkronisasi dan harmonisasi tentang tata cara pelayanan perijinan penanaman modal bagi aparatur pemerintah propinsi dan kabupaten atau kota serta dunia usaha	100%	100%			
			4. Jumlah pedoman penilaian permohonan penanaman modal	1 (satu) buah buku pedoman	5 (lima) buah buku pedoman ^{K)}			
			5. Jumlah penyelenggaraan peningkatan kapasitas teknis bagi aparatur pelaksana pelayanan penanaman modal	100%	100%			
f.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Fasilitas Penanaman Modal (prioritas bidang)	Meningkatnya kualitas pelayanan fasilitas penanaman modal	1. Jumlah fasilitas penanaman modal yang dapat diproses dalam satu satuan waktu tertentu.	100%	100%	PROGRAM PENINGKATAN DAYA SAING PENANAMAN MODAL	BKPM	24,0
			2. Jumlah partisipasi instansi sektoral dan daerah dalam pelaksanaan sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu	100%	100%			

BIDANG PEMBANGUNAN : PEREKONOMIAN

PRIORITAS : Peningkatan Investasi

NO	FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil <i>outcomes/output</i> yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010 - 2014 (Rp. Miliar)
				2010	2014			
			3. Jumlah kegiatan sinkronisasi dan harmonisasi tentang tata cara pelayanan fasilitas penanaman modal bagi aparatur pemerintah propinsi dan kabupaten atau kota serta dunia usaha	5 Provinsi	10 Provinsi			
			4. Jumlah pedoman penilaian permohonan penanaman modal	2 pedoman	11 pedoman ^{K)}			
			5. Jumlah penyelenggaraan peningkatan kapasitas teknis bagi aparatur pelaksana pelayanan penanaman modal	6 Materi	8 Materi			
			6. Tercapainya peningkatan jumlah komoditas yang dapat dijadikan acuan dalam proses penilaian	10 Bidang	54 Bidang ^{K)}			
g.	Koordinasi Peningkatan Ekspor dan Peningkatan Investasi (PEPI)	Meningkatnya Koordinasi di Bidang peningkatan Ekspor dan peningkatan Investasi	Persentase Rekomendasi hasil koordinasi kebijakan di Bidang Peningkatan Ekspor dan Investasi yang terimplementasikan	65%	85%	Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian	Kemeko Perekonomian	15,8

BIDANG PEMBANGUNAN : PEREKONOMIAN

PRIORITAS : Peningkatan Investasi

NO	FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil <i>outcomes/output</i> yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010 - 2014 (Rp. Miliar)
				2010	2014			
2.	FOKUS : Peningkatan Fasilitas Investasi	Meningkatkan realisasi investasi PMDN dan PMA	IUT PMDN(Rp. triliun)	35,28-39,50	61,71-78,02		BKPM	1.356,8
			IUT PMA (USD miliar)	13,08-13,20	22,88-26,10			
a.	Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Penanaman Modal (prioritas nasional)	Meningkatnya kualitas pelayanan penanaman modal di pusat dan di daerah	Pendidikan dan Pelatihan Penyelenggaraan PTSP di bidang Penanaman Modal	Peserta : 2.000 orang	Peserta : 2.000 orang	PROGRAM PENINGKATAN DAYA SAING PENANAMAN MODAL	BKPM	265,7
				4 jenis pelatihan:	4 jenis pelatihan:			
				Dasar, Lanjutan I, Lanjutan II, & SPIPISE	Dasar, Lanjutan I, Lanjutan II, & SPIPISE			
			Penetapan Kualifikasi Kelembagaan PTSP di Bidang Penanaman Modal	265 PTSP	265 PTSP			
			Pengadaan sarana dan prasarana penunjang Penyelenggaraan PTSP di bidang Penanaman Modal	33 Prop + 30 kab/kota	33 Prop + 90 kab/kota ^{K)}			
			Sosialisasi perijinan dan nonperijinan di bidang penanaman modal	33 Propinsi	33 Propinsi			
			Fasilitasi Penghubung di BKPM	19 instansi + 33 propinsi masing-masing 1 orang	19 instansi + 33 propinsi masing-masing 1 orang			

BIDANG PEMBANGUNAN : PEREKONOMIAN

PRIORITAS : Peningkatan Investasi

NO	FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil <i>outcomes/output</i> yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010 - 2014 (Rp. Miliar)
				2010	2014			
			Penyederhanaan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal (<i>Streamlining</i> Bisnis Proses Perijinan dan Nonperijinan)	3 Instansi	3 Instansi			
b.	Pengembangan Sistem Pelayanan Informasi dan Perijinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) (Prioritas Nasional)	Meningkatnya kualitas pengembangan Sistem Pelayanan Informasi dan Perijinan Investasi Secara Elektronik/ <i>Online</i> (SPIPISE)	Peningkatan jumlah aplikasi perijinan dan non perijinan yang menjadi wewenang BKPM, PTSP Propinsi, PTSP Kab./Kota yang terbangun dalam SPIPISE	Perijinan di 3 sektor	Implementasi nasional untuk semua sektor	PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA BKPM	BKPM	100,3
		Jumlah peningkatan PTSP Prop. dan Kab/Kota yang terhubung dalam SPIPISE	50 Kab/Kota dan 33 Propinsi	50 Kab/Kota dan 33 Propinsi				
		Terbangunnya infrastruktur dan <i>database</i> penanaman modal yang terintegrasi	Penambahan kapasitas dan kemampuan infrastruktur pada jaringan BKPM	Penambahan kapasitas dan kemampuan infrastruktur pada jaringan BKPM				

BIDANG PEMBANGUNAN : PEREKONOMIAN

PRIORITAS : Peningkatan Investasi

NO	FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil <i>outcomes/output</i> yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010 - 2014 (Rp. Miliar)
				2010	2014			
			Jumlah propinsi dan Kab/Kota yang mengikuti sosialisasi & pelatihan	50 Kab/Kota dan 33 Propinsi	50 Kab/Kota dan 33 Propinsi			
c.	Pengembangan Sumber Daya Manusia (Prioritas Bidang)	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan dan pengkoordinasian pendidikan dan pelatihan bagi aparatur	Jumlah aparatur BKPM yang mengikuti Diklat Struktural, Diklat Teknis, Diklat Fungsional, dan tenaga kediklatan serta jumlah kurikulum dan modul diklat.	2.579 Orang 10 modul	2.000 Orang 19 modul	PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA BKPM	BKPM	34,1
d.	Peningkatan Pelayanan Hukum Penanaman Modal (Prioritas Bidang)	Meningkatnya kualitas pelayanan, pertimbangan dan bantuan hukum serta penyelesaian kasus/sengketa di bidang penanaman modal	Jumlah pelaksanaan bantuan hukum dan penyelesaian sengketa di bidang penanaman modal secara efisien efektif.	Pelayanan konsultasi hukum penanaman modal sejumlah 48 kali konsultasi	Pelayanan konsultasi hukum penanaman modal sejumlah 34 kali konsultasi	PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA BKPM	BKPM	33,7

BIDANG PEMBANGUNAN : PEREKONOMIAN

PRIORITAS : Peningkatan Investasi

NO	FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil <i>outcomes/output</i> yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010 - 2014 (Rp. Miliar)
				2010	2014			
				Penanganan permasalahan dan bantuan hukum bidang penanaman modal di dalam/di luar pengadilan sejumlah 18 kegiatan	Penanganan permasalahan dan bantuan hukum bidang penanaman modal di dalam/di luar pengadilan sejumlah 14 kegiatan			
e.	Pembangunan/pengadaan/ peningkatan sarana dan prasarana (Prioritas Bidang)	Meningkatnya sarana dan prasarana kerja yang dibutuhkan	Persentase tercapainya peningkatan sarana dan prasarana kerja di pusat dan daerah	100%	100%	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR BKPM	BKPM	63,0
f.	Pengembangan Penanaman Modal di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) (prioritas nasional)	Terbentuknya KEK di 5 lokasi	Persentase penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan KEK	100%	100%	PROGRAM PENINGKATAN DAYA SAING PENANAMAN MODAL	BKPM	18,0

BIDANG PEMBANGUNAN : PEREKONOMIAN

PRIORITAS : Peningkatan Investasi

NO	FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil <i>outcomes/output</i> yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010 - 2014 (Rp. Miliar)
				2010	2014			
			Persentase penetapan institusi Sekretariat Dewan Nasional KEK	100%	100%			
			Persentase pengoperasian Sekretariat Dewan Nasional KEK	-	100%			
			asistensi dan fasilitasi dalam rangka penetapan dan pengembangan KEK (a.l. verifikasi, <i>assessment</i> , evaluasi)	100%	100%			
			Hasil Koordinasi masalah strategis di bidang pengembangan KEK	1 buku laporan	5 buku laporan ^{K)}			
			Jumlah promosi penanaman modal di KEK	2 negara & 3 daerah	7 negara & 8 daerah			
			Kerja sama di bidang pengembangan KEK	-	5 negara			
g.	Koordinasi Pengembangan Urusan Penataan Ruang Dan Pengembangan Wilayah (termasuk KEK, KAPET, dan kawasan lainnya)	a. Meningkatnya Koordinasi Urusan Penataan Ruang Dan Pengembangan Wilayah	Persentase rekomendasi hasil koordinasi kebijakan Urusan Penataan Ruang dan Pengembangan Wilayah yang terimplementasi	75%	90%	Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian	Kemenko Perekonomian	22,7
		b. Terselesaikannya Peraturan Penyelenggaraan KEK dan penetapan Lokasi KEK dan pengembangan KAPET	Persentase peraturan pelaksana UU KEK yang terselesaikan	60%	95%			
			Jumlah Lokasi KEK yang ditetapkan	1	7 ^{K)}			

BIDANG PEMBANGUNAN : PEREKONOMIAN

PRIORITAS : Peningkatan Investasi

NO	FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil <i>outcomes/output</i> yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010 - 2014 (Rp. Miliar)
				2010	2014			
h.	Perencanaan Pengembangan Penanaman Modal Sektor Industri Agribisnis & Sumber Daya Alam Lainnya (prioritas bidang)	Meningkatnya kualitas Pemetaan & Perencanaan Pengembangan Penanaman Modal Sektor Industri Agribisnis & Sumber Daya Alam Lainnya	<p>1. Jumlah pedoman arah kebijakan umum perencanaan penanaman modal yang berorientasi pada peningkatan daya saing di sektor industri agribisnis dan sumber daya alam lainnya.</p> <p>2. Jumlah kajian perencanaan pengembangan penanaman modal yang berorientasi pada peningkatan daya saing di sektor industri agribisnis dan sumber daya alam lainnya.</p> <p>3. Jumlah kajian perencanaan insentif penanaman modal di sektor industri agribisnis dan sumber daya alam lainnya.</p> <p>4. Jumlah buku pedoman tentang Norma, Standar dan Prosedur yang Baku dalam melakukan Perencanaan Penanaman Modal di Pusat dan di Daerah di Sektor Agribisnis & Sumber Daya Alam lainnya.</p>	<p>1 pedoman arah kebijakan penanaman modal</p> <p>1 kajian sektor baru dan 1 kajian sektor <i>Up-Dating</i></p> <p>1 kajian perencanaan insentif penanaman modal</p> <p>1 buku pedoman NSP perencanaan penanaman modal</p>	<p>5 pedoman arah kebijakan penanaman modal ^{K)}</p> <p>5 kajian sektor baru dan 1 kajian sektor <i>Up-Dating</i> ^{K)}</p> <p>5 kajian perencanaan insentif penanaman modal ^{K)}</p> <p>5 buku pedoman NSP perencanaan penanaman modal ^{K)}</p>	PROGRAM PENINGKATAN DAYA SAING PENANAMAN MODAL	BKPM	31,2

BIDANG PEMBANGUNAN : PEREKONOMIAN

PRIORITAS : Peningkatan Investasi

NO	FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil <i>outcomes/output</i> yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010 - 2014 (Rp. Miliar)
				2010	2014			
i.	Perencanaan Pengembangan Penanaman Modal Sektor Industri Manufaktur (prioritas bidang)	Meningkatnya kualitas Perencanaan Pengembangan Penanaman Modal Sektor Industri Manufaktur	1. Jumlah pedoman arah kebijakan perencanaan penanaman modal yang berorientasi pada peningkatan daya saing di sektor industri manufaktur.	1 pedoman arah kebijakan penanaman modal	5 pedoman arah ^{K)} kebijakan penanaman modal	PROGRAM PENINGKATAN DAYA SAING PENANAMAN MODAL	BKPM	31,8
			2. Jumlah kajian perencanaan pengembangan penanaman modal yang berorientasi pada peningkatan daya saing di sektor industri manufaktur.	1 kajian sektor baru dan 1 kajian sektor <i>Up- Dating</i>	5 kajian sektor ^{K)} baru dan 1 kajian sektor <i>Up-Dating</i>			
			3. Jumlah kajian Perencanaan Insentif Penanaman Modal di Sektor Industri Manufaktur	1 kajian perencanaan insentif penanaman modal	5 kajian ^{K)} perencanaan insentif penanaman modal			
			4. Jumlah buku tentang Norma, Standar dan Prosedur yang Baku dalam melakukan Perencanaan Penanaman Modal di Pusat dan di Daerah di Sektor Industri Manufaktur	1 buku pedoman NSP perencanaan penanaman modal	5 buku pedoman ^{K)} NSP perencanaan penanaman modal			

BIDANG PEMBANGUNAN : PEREKONOMIAN

PRIORITAS : Peningkatan Investasi

NO	FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil <i>outcomes/output</i> yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010 - 2014 (Rp. Miliar)
				2010	2014			
j.	Perencanaan Pengembangan Penanaman Modal di bidang Sarana, Prasarana, Jasa dan Kawasan (prioritas bidang)	Meningkatnya kualitas Pemetaan & Perencanaan Pengembangan Penanaman Modal di Bidang Sarana, Prasarana, Jasa dan Kawasan	<p>1. Jumlah pedoman arah kebijakan perencanaan penanaman modal yang berorientasi pada peningkatan daya saing di sektor sarana prasarana, jasa dan kawasan.</p> <p>2. Jumlah kajian perencanaan pengembangan penanaman modal yang berorientasi pada peningkatan daya saing di sektor sarana prasarana, jasa dan kawasan.</p> <p>3. Jumlah kajian Perencanaan Insentif Penanaman Modal di sektor Sarana, Prasarana, Jasa dan Kawasan.</p> <p>4. Jumlah buku tentang Norma, Standar dan Prosedur Baku dalam melakukan Perencanaan Penanaman Modal di Pusat dan di Daerah di sektor Sarana, Prasarana, Jasa dan Kawasan.</p>	<p>1 pedoman</p> <p>1 kajian baru dan 1 <i>updating</i> kajian sektor</p> <p>1 kajian</p> <p>1 buku pedoman NSP perencanaan penanaman modal/1 <i>Updating</i> kajian sektor</p>	<p>5 pedoman ^{K)}</p> <p>5 kajian baru dan 1 <i>updating</i> kajian sektor</p> <p>5 kajian ^{K)}</p> <p>5 buku pedoman ^{K)} NSP perencanaan penanaman modal/ 1 <i>Updating</i> kajian sektor</p>	PROGRAM PENINGKATAN DAYA SAING PENANAMAN MODAL	BKPM	27,1

BIDANG PEMBANGUNAN : PEREKONOMIAN

PRIORITAS : Peningkatan Investasi

NO	FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil <i>outcomes/output</i> yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010 - 2014 (Rp. Miliar)
				2010	2014			
k.	Peningkatan Kualitas Strategi Promosi di Bidang Penanaman Modal (prioritas bidang)	Meningkatnya kualitas pengembangan strategi promosi yang berpijak pada peningkatan daya saing penanaman modal	<p>1. Pemetaan kebijakan, insentif dan potensi penanaman modal negara pesaing dan negara target investasi yang berorientasi pada peningkatan strategi promosi penanaman modal.</p> <p>2. Pemetaan sektor potensial di Indonesia yang berorientasi pada pengembangan kebijakan promosi penanaman modal.</p> <p>3. Jumlah perencanaan dan pengembangan fokus strategi promosi penanaman modal yang berbasis sektor, wilayah dan baurannya.</p> <p>4. Jumlah strategi promosi penanaman modal yang efektif dan efisien dengan mengedepankan daya saing penanaman modal.</p>	<p>180 target investor potensial</p> <p>informasi iklim investasi di Indonesia dan 6 negara pesaing</p> <p>16 bahan masukan dalam penyusunan strategi promosi investasi</p> <p>16 strategi promosi</p>	<p>240 target investor potensial</p> <p>informasi iklim investasi di Indonesia dan 12 negara pesaing</p> <p>24 bahan masukan dalam penyusunan strategi promosi investasi</p> <p>24 strategi promosi</p>	PROGRAM PENINGKATAN DAYA SAING PENANAMAN MODAL	BKPM	207,3

BIDANG PEMBANGUNAN : PEREKONOMIAN

PRIORITAS : Peningkatan Investasi

NO	FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil <i>outcomes/output</i> yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010 - 2014 (Rp. Miliar)
				2010	2014			
			5. Sarana promosi penanaman modal yang efektif dengan pengembangan kantor perwakilan BKPM di luar negeri.	Mendapatkan investor asing sebanyak-banyaknya dari 6 perwakilan di luar negeri	Mendapatkan investor asing sebanyak-banyaknya dari 10 perwakilan di luar negeri			
1.	Promosi Penanaman Modal Sektoral Terpadu dan Terintegrasi di Dalam dan Luar Negeri (prioritas bidang)	Meningkatnya kualitas promosi penanaman modal sektoral terpadu yang berpijak pada peningkatan daya saing penanaman modal	<p>1. Penyelenggaraan promosi penanaman modal berdasarkan sektor dan negara melalui antara lain temu usaha, <i>business forum</i>, <i>business match-making</i>, dan sebagainya.</p> <p>2. Jumlah Marketing Investasi Indonesia dan <i>Rebranding</i> penanaman modal Indonesia melalui Media Internasional yang berpijak pada daya saing penanaman modal.</p> <p>3. Target partisipasi <i>stakeholder</i> di tingkat pusat dalam penyelenggaraan promosi penanaman modal berdasarkan sektor dan negara di luar negeri.</p>	16 kegiatan	25 kegiatan	PROGRAM PENINGKATAN DAYA SAING PENANAMAN MODAL	BKPM	183,2

BIDANG PEMBANGUNAN : PEREKONOMIAN

PRIORITAS : Peningkatan Investasi

NO	FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil <i>outcomes/output</i> yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010 - 2014 (Rp. Miliar)
				2010	2014			
m.	Fasilitasi Daerah Dalam Rangka Kegiatan Promosi Penanaman Modal (prioritas bidang)	Meningkatnya kualitas fasilitasi daerah yang berpijak pada peningkatan daya saing penanaman modal	1. Jumlah fasilitasi promosi daerah	33 Instansi Penanaman Modal Propinsi untuk ikut serta dalam kegiatan promosi investasi di dalam dan luar negeri	33 Instansi Penanaman Modal Propinsi untuk ikut serta dalam kegiatan promosi investasi di dalam dan luar negeri	PROGRAM PENINGKATAN DAYA SAING PENANAMAN MODAL	BKPM	91,6
			2. Jumlah fasilitasi pelayanan penerimaan misi penanam modal luar negeri di pusat dan di daerah tempat tujuan rencana penanaman modal.	misi investasi 33 kali di pusat dan daerah	misi investasi 50 kali di pusat dan daerah			
			3. Jumlah pelayanan pendampingan misi pusat dan daerah ke negara potensial penanam modal di berbagai sektor usaha.	promosi investasi di 6 negara	promosi investasi di 18 negara			

BIDANG PEMBANGUNAN : PEREKONOMIAN

PRIORITAS : Peningkatan Investasi

NO	FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil <i>outcomes/output</i> yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010 - 2014 (Rp. Miliar)
				2010	2014			
			4. Jumlah kegiatan promosi penanaman modal daerah di dalam negeri antara lain <i>Talkshow</i> , Gelar Potensi Investasi Daerah (GPID), Seminar Investasi (<i>Business Meeting, Match Making, One on One Meeting</i>).	6 kali <i>TalkShow</i> di TV Nasional, 2 kali Gelar Potensi Investasi Daerah (GPID) di Jawa Timur dan Sulawesi Utara, 2 kali Seminar Investasi di Jawa Timur dan Sulawesi Utara (<i>Business Meeting, Matchmaking, One-on-One Meeting</i>)	8 kali <i>TalkShow</i> di TV Nasional, 3 kali Gelar Potensi Investasi Daerah (GPID) di Sumatera Barat, Kalimantan Selatan dan DKI Jakarta, 3 kali Seminar Investasi di Sumatera Barat, Kalimantan Selatan dan DKI Jakarta (<i>Business Meeting, matchmaking, One-on-One Meeting</i>)			

BIDANG PEMBANGUNAN : PEREKONOMIAN

PRIORITAS : Peningkatan Investasi

NO	FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil <i>outcomes/output</i> yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010 - 2014 (Rp. Miliar)
				2010	2014			
			5. Jumlah kegiatan promosi penanaman modal daerah di luar negeri antara lain <i>Marketing Investasi Indonesia (MII)</i> dan <i>Trade, Tourism and Investment (TTI) Forum, Joint Promotion</i> antara Pusat dan Daerah, <i>Joint Promotion</i> antar Instansi Pusat (instansi penanaman modal pusat dengan instansi-instansi sektor dan lembaga-lembaga terkait)	Terfasilitasinya Instansi Penanaman Modal Propinsi/Instansi Penanaman Modal Kabupaten (IPMP/IPMK) dalam kegiatan MII di 3 negara dan TTI di 6 negara	Terfasilitasinya IPMP/IPMK dalam kegiatan MII di 3 negara dan TTI di 6 negara			
n.	Penyelenggaraan Pameran dan Penyediaan Sarana Promosi Penanaman Modal untuk Kegiatan di Dalam dan di Luar Negeri (prioritas bidang)	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pameran dan penyediaan sarana promosi penanaman modal yang berpijak pada peningkatan daya saing penanaman modal	1. Jumlah kegiatan pameran yang mengikutsertakan instansi penanaman modal di pusat dan daerah, instansi sektoral pusat dan daerah, asosiasi/kalangan dunia usaha serta masyarakat lainnya dalam pelaksanaan pameran.	150 pameran	150 pameran	PROGRAM PENINGKATAN DAYA SAING PENANAMAN MODAL	BKPM	51,1

BIDANG PEMBANGUNAN : PEREKONOMIAN

PRIORITAS : Peningkatan Investasi

NO	FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil <i>outcomes/output</i> yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010 - 2014 (Rp. Miliar)
				2010	2014			
			2. Informasi potensi penanaman modal, antara lain profil proyek, brosur, <i>leaflet</i> , <i>Indonesian Investment News</i> , <i>Guide for Investor</i> , <i>Investment Procedure</i> s, film, video, slide, CD ROM dan multimedia/situs web .	1000 eksemplar brosur dan <i>leaflet</i> , 6500 eksemplar <i>Brief Guide for Investment</i> , 15000 eksemplar <i>Investment Procedures</i> dan buku-buku peraturan, media elektronik.	2500 eksemplar brosur dan <i>leaflet</i> , 9000 eksemplar <i>Brief Guide for Investment</i> , 30000 eksemplar <i>Investment Procedures</i> dan buku-buku peraturan, media elektronik.			
			3. Jumlah kegiatan pameran baik di dalam maupun di luar negeri.	9 pameran di dalam negeri dan 15 pameran di luar negeri	13 pameran di dalam negeri dan 22 pameran di luar negeri			
			4. Jumlah kunjungan dan minat penanaman modal sebagai respon terhadap penyelenggaraan pameran serta kegiatan promosi lainnya baik di dalam dan di luar negeri	1.650 pengunjung dan 100 peminat	1.650 pengunjung dan 100 peminat			

BIDANG PEMBANGUNAN : PEREKONOMIAN

PRIORITAS : Peningkatan Investasi

NO	FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil <i>outcomes/output</i> yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010 - 2014 (Rp. Miliar)
				2010	2014			
o.	Kerjasama Bilateral dan Multilateral di Bidang Penanaman Modal (prioritas bidang)	Meningkatnya strategi dan teknik yang berdaya saing untuk memperoleh manfaat yang optimal dari perundingan-perundingan kerjasama bilateral dan multilateral dalam rangka memberikan jaminan dan perlindungan di bidang penanaman modal	1. Jumlah laporan partisipasi aktif BKPM dalam fora perundingan kerjasama bilateral dan multilateral.	23 laporan	106 laporan ^{K)}	PROGRAM PENINGKATAN DAYA SAING PENANAMAN MODAL	BKPM	22,5
			2. Jumlah laporan tentang jumlah dan kualitas bahan posisi perundingan dalam rangka kerjasama bilateral dan multilateral.	4 Laporan	20 Laporan ^{K)}			
			3. Jumlah laporan koordinasi internal dan eksternal dalam kerangka kerjasama pengembangan ekonomi wilayah tertentu.	2 Laporan	10 Laporan ^{K)}			
			4. Jumlah peserta sosialisasi hasil-hasil perundingan bilateral dan multilateral.	120 Orang	100 Orang			

BIDANG PEMBANGUNAN : PEREKONOMIAN

PRIORITAS : Peningkatan Investasi

NO	FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil <i>outcomes/output</i> yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010 - 2014 (Rp. Miliar)
				2010	2014			
p.	Kerjasama Regional di Bidang Penanaman Modal (prioritas bidang)	Meningkatnya strategi dan teknik yang berdaya saing untuk memperoleh manfaat yang optimal dari perundingan-perundingan kerjasama regional dalam rangka memberikan jaminan dan perlindungan di bidang penanaman modal	1. Jumlah laporan partisipasi aktif BKPM dalam fora perundingan kerjasama regional.	30 Laporan	155 Laporan ^{K)}	PROGRAM PENINGKATAN DAYA SAING PENANAMAN MODAL	BKPM	30,1
			2. Jumlah laporan tentang jumlah dan kualitas bahan posisi perundingan dalam rangka kerjasama regional.	33 Laporan	158 Laporan ^{K)}			
			3. Jumlah laporan kegiatan penyelenggaraan Seknas KESR.	24 Laporan	120 Laporan ^{K)}			
			4. Jumlah peserta sosialisasi hasil-hasil perundingan kerjasama regional	180 Orang	220 Orang			
q.	Kerjasama dengan Dunia Usaha Asing di Dalam dan di Luar Negeri di Bidang Penanaman Modal (prioritas bidang)	Meningkatnya strategi dan teknik yang berdaya saing untuk memperoleh manfaat yang optimal dari perundingan-perundingan kerjasama dunia usaha internasional	1. Jumlah partisipasi aktif BKPM dalam fora perundingan kerjasama dengan dunia usaha internasional.	35 kali	50 kali	PROGRAM PENINGKATAN DAYA SAING PENANAMAN MODAL	BKPM	16,9
			2. Jumlah kesepakatan kerjasama dengan dunia usaha internasional	4 kesepakatan	16 kesepakatan			

BIDANG PEMBANGUNAN : PEREKONOMIAN

PRIORITAS : Peningkatan Investasi

NO	FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil <i>outcomes/output</i> yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010 - 2014 (Rp. Miliar)
				2010	2014			
			3. Jumlah laporan pendataan penanam modal dalam negeri yang menjalankan kegiatan penanaman modalnya di luar wilayah Indonesia dan sosialisasinya kepada instansi terkait.	Laporan pendataan dan informasi FDI <i>Outflow</i> Indonesia melalui 5 kali sosialisasi di KBRI/KJRI	Laporan pendataan dan informasi FDI <i>Outflow</i> Indonesia melalui 10 kali sosialisasi di KBRI/KJRI			
r.	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Wilayah I (prioritas bidang)	Mendorong realisasi penanaman modal di Sumatera	1. Jumlah proyek yang dipantau perkembangan realisasi penanaman modalnya di seluruh propinsi di Pulau Sumatera dan kepulauan di sekitarnya. 2. Jumlah daerah yang mendapatkan bimbingan dan fasilitasi penyelesaian masalah yang dihadapi 3. Jumlah perusahaan yang mendapatkan pengawasan pelaksanaan penanam modal.	1.500 proyek 10 Daerah 200 Perusahaan	1.700 proyek 10 Daerah 150 Perusahaan	PROGRAM PENINGKATAN DAYA SAING PENANAMAN MODAL	BKPM	42,7

BIDANG PEMBANGUNAN : PEREKONOMIAN

PRIORITAS : Peningkatan Investasi

NO	FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil <i>outcomes/output</i> yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010 - 2014 (Rp. Miliar)
				2010	2014			
s.	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Wilayah II (prioritas bidang)	Mendorong realisasi penanaman modal di Kalimantan , DKI Jakarta dan DI Yogyakarta	1. Jumlah proyek yang dipantau perkembangan realisasi penanaman modalnya di propinsi DKI Jakarta, DI Yogyakarta, dan seluruh propinsi di Pulau Kalimantan dan kepulauan di sekitarnya.	6.000 Proyek	7.000 Proyek	PROGRAM PENINGKATAN DAYA SAING PENANAMAN MODAL	BKPM	28,0
			2. Jumlah daerah yang mendapatkan bimbingan dan fasilitasi penyelesaian masalah yang dihadapi penanam modal antara lain dengan instansi terkait, masyarakat sekitar lokasi proyek, lingkungan hidup dan ketenagakerjaan	6 Daerah	6 Daerah			
			3. Jumlah perusahaan yang mendapatkan pengawasan pelaksanaan penanam modal	240 Perusahaan	480 Perusahaan			

BIDANG PEMBANGUNAN : PEREKONOMIAN

PRIORITAS : Peningkatan Investasi

NO	FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil <i>outcomes/output</i> yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010 - 2014 (Rp. Miliar)
				2010	2014			
t.	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Wilayah III (prioritas bidang)	Mendorong realisasi penanaman modal di Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah dan Sulawesi	<p>1. Jumlah proyek yang dipantau perkembangan realisasi penanaman modalnya di Propinsi Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah dan seluruh propinsi di Pulau Sulawesi dan kepulauan di sekitarnya.</p> <p>2. Jumlah daerah yang mendapatkan bimbingan dan fasilitasi penyelesaian masalah yang dihadapi penanaman modal antara lain dari aspek dengan instansi terkait, masyarakat sekitar lokasi proyek, lingkungan hidup dan ketenagakerjaan</p> <p>3. Jumlah perusahaan yang mendapatkan pengawasan pelaksanaan penanaman modal</p>	4.000 Proyek	6.000 Proyek	PROGRAM PENINGKATAN DAYA SAING PENANAMAN MODAL	BKPM	14,7

BIDANG PEMBANGUNAN : PEREKONOMIAN

PRIORITAS : Peningkatan Investasi

NO	FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil <i>outcomes/output</i> yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010 - 2014 (Rp. Miliar)	
				2010	2014				
u.	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Wilayah IV (prioritas bidang)	Mendorong realisasi penanaman modal di Direktorat Wilayah IV (Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat)	1. Jumlah proyek yang dipantau perkembangan realisasi penanaman modalnya seluruh propinsi Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat	1.550 proyek	2.000 proyek	PROGRAM PENINGKATAN DAYA SAING PENANAMAN MODAL	BKPM	41,1	
			2. Jumlah daerah yang mendapatkan bimbingan dan fasilitasi penyelesaian masalah yang dihadapi penanaman modal antara lain dari aspek dengan instansi terkait, masyarakat sekitar lokasi proyek, lingkungan hidup dan ketenagakerjaan	8 daerah	8 daerah				
			3. Jumlah perusahaan yang pengawasan pelaksanaan penanaman modal	200 perusahaan	150 perusahaan				
			4. Pemberian penghargaan investasi dan pelayanan Penanaman Modal kepada Propinsi atau Kabupaten/Kota serta perusahaan PMA/PMDN	-	4 paket ^{K)}				
TOTAL									1.609,9

RENCANA TINDAK PRIORITAS BIDANG PEREKONOMIAN

BIDANG PEMBANGUNAN : PEREKONOMIAN

PRIORITAS : Peningkatan Ekspor

NO	FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN /LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010 - 2014 (Rp. Miliar)
				2010	2014			
1.	FOKUS : Peningkatan Diversifikasi Pasar Tujuan Ekspor	Meningkatnya diversifikasi pasar tujuan ekspor, yang diukur dengan menurunnya tingkat kebergantungan kepada lima pasar tujuan ekspor terbesar	Pangsa pasar di 5 negara tujuan ekspor nonmigas terbesar/Indeks CRS (%)	47	43		Kementerian Perdagangan	1.251,6
a.	Peningkatan kualitas promosi dan kelembagaan ekspor (Prioritas Bidang)	Meningkatnya peran lembaga promosi dan nilai tambah produk ekspor non migas	Jumlah pameran dagang dalam negeri	21	30	Pengembangan Ekspor	Kementerian Perdagangan	726,1
		Jumlah kerjasama dengan instansi terkait/asosiasi/dunia usaha	8	11				
		Jumlah penyelenggaraan kantor ITPC	20	30				
		Persentase penyerapan anggaran Dekon Pengembangan Ekspor Daerah	100	100				
b.	Pengembangan Pasar dan Produk Ekspor di Wilayah Afrika dan Timur Tengah (Prioritas Bidang)	Berkembangnya informasi pasar dan produk ekspor bagi dunia usaha, serta meningkatnya kerjasama dengan instansi terkait di wilayah Afrika dan Timur Tengah	Jumlah promosi dagang internasional yang diikuti	20	42	Program Pengembangan Ekspor	Kementerian Perdagangan	66,6
		Jumlah inquiry yang dihasilkan dari pameran dagang	600	1350				
		Jumlah peserta yang mengikuti pameran dagang	160	275				
		Jumlah buku petunjuk pasar, profil produk, analisa pasar dan katalog produk yang disusun	27	48				
		Jumlah kerjasama dengan instansi terkait dalam pengembangan produk dan pasar di wilayah Afrika dan Timur Tengah	5	9				

BIDANG PEMBANGUNAN : PEREKONOMIAN

PRIORITAS : Peningkatan Ekspor

NO	FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN /LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010 - 2014 (Rp. Miliar)
				2010	2014			
c.	Pengembangan Pasar dan Produk Ekspor di Wilayah Asia, Australia dan Selandia Baru (Prioritas Bidang)	Berkembangnya informasi pasar dan produk ekspor bagi dunia usaha, serta meningkatnya kerjasama dengan instansi terkait di wilayah Asia, Australia dan Selandia Baru	Jumlah promosi dagang internasional yang diikuti	18	35	Program Pengembangan Ekspor	Kementerian Perdagangan	95,4
			Jumlah inquiry yang dihasilkan dari pameran dagang	600	1350			
			Jumlah peserta yang mengikuti pameran dagang	230	530			
			Jumlah buku petunjuk pasar, profil produk, analisa pasar dan katalog produk yang disusun	19	32			
			Jumlah kerjasama dengan instansi terkait dalam pengembangan produk dan pasar di wilayah Asia, Australia dan Selandia Baru	7	15			
d.	Pengembangan SDM Bidang Ekspor (Prioritas Bidang)	Meningkatnya jumlah dan kualitas pelatihan eksportir dan calon eksportir	Jumlah pelatihan yang berorientasi ekspor	120	140	Program Pengembangan Ekspor	Kementerian Perdagangan	131,5
			Jumlah pelayanan prima terhadap peserta diklat	50	70			
			Jumlah pengembangan kurikulum dan metode diklat	9	10			
			Jumlah laporan monitoring dan evaluasi diklat ekspor	120	140			
			Jumlah kegiatan promosi kegiatan PPEI	25	50			
			Jumlah kerjasama diklat ekspor di dalam dan luar negeri	55	65			
			Jumlah peserta kegiatan temu alumni	100	100			
			Jumlah kegiatan partisipasi pameran bersama bagi alumni sebagai layanan program pascadiklat	4	12			

BIDANG PEMBANGUNAN : PEREKONOMIAN

PRIORITAS : Peningkatan Ekspor

NO	FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN /LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010 - 2014 (Rp. Miliar)
				2010	2014			
e.	Peningkatan Peran dan Kemampuan Diplomasi Perdagangan Internasional (Prioritas Nasional)	Meningkatnya peran dan kemampuan Indonesia di bidang diplomasi perdagangan internasional guna pembukaan, peningkatan dan pengamanan akses pasar	Jumlah partisipasi dalam perundingan perdagangan internasional	40	55	Program Peningkatan Kerjasama Perdagangan Internasional	Kementerian Perdagangan	179,9
			Jumlah posisi runding yang disusun	40	55			
			Jumlah penyelenggaraan sidang internasional di Dalam Negeri	8	8			
			Jumlah hasil perundingan Perdagangan Internasional (MRA, MoU, Agreement, Agreed Minutes, Declaration, Chair Report)	34	34			
			Jumlah forum konsultasi teknis kesepakatan perundingan internasional	6	8			
f.	Peningkatan Kerjasama dan Perundingan Bilateral di Kawasan Asia, Amerika dan Australia (Prioritas Bidang)	Meningkatnya hasil kerjasama dan perundingan perdagangan bilateral di kawasan Asia, Amerika dan Australia	Jumlah partisipasi dalam perundingan kerjasama bilateral di kawasan Asia, Amerika dan Australia	20	42	Program Peningkatan Kerjasama Perdagangan Internasional	Kementerian Perdagangan	26,0
			Jumlah hasil perundingan kerjasama perdagangan bilateral di kawasan Asia, Amerika dan Australia	5	2			
			Jumlah kesepakatan kerjasama perdagangan bilateral di kawasan Asia, Amerika dan Australia yang diratifikasi	1	2 ^{k)}			
g.	Peningkatan Kerjasama dan Perundingan Bilateral di Kawasan Afrika, Eropa, dan Timur Tengah (Prioritas Bidang)	Meningkatnya hasil kerjasama dan perundingan perdagangan bilateral di Kawasan Afrika, Eropa, dan Timur Tengah	Jumlah partisipasi dalam perundingan kerjasama bilateral di Kawasan Afrika, Eropa, dan Timur Tengah	12	12	Program Peningkatan Kerjasama Perdagangan Internasional	Kementerian Perdagangan	26,0
			Jumlah hasil perundingan kerjasama perdagangan bilateral di Kawasan Afrika, Eropa, dan Timur Tengah	6	20 ^{k)}			

BIDANG PEMBANGUNAN : PEREKONOMIAN

PRIORITAS : Peningkatan Ekspor

NO	FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN /LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010 - 2014 (Rp. Miliar)
				2010	2014			
			Jumlah kesepakatan kerjasama perdagangan bilateral di Kawasan Afrika, Eropa, dan Timur Tengah yang diratifikasi	0	1			
2.	FOKUS : Peningkatan Kualitas dan Keberagaman Produk Ekspor	Meningkatnya kualitas dan keberagaman produk ekspor, yang diukur dengan meningkatnya indeks diversifikasi produk ekspor nonmigas	Indeks diversifikasi ekspor nonmigas	0.67	0.59		Kementerian Perdagangan	637,0
a.	Peningkatan Pengawasan dan Pengendalian Mutu Barang (Prioritas Bidang)	Tersedianya kebijakan dan bimbingan teknis pengawasan dan pengendalian mutu	<p>PEDULI MUTU :</p> <p>1.1 Jumlah bimbingan teknis, sosialisasi, monitoring untuk meningkatkan mutu produk ekspor (komoditi)</p> <p>1.2 Jumlah bimtek, sosialisasi untuk meningkatkan kepedulian mutu produk impor (daerah)</p> <p>KENDALI MUTU:</p> <p>2.1 Pengawasan mutu barang ekspor melalui <i>preshipment inspection</i> (komoditi)</p> <p>2.2 Pengawasan mutu barang impor melalui pengawasan pra-pasar dengan mekanisme pendaftaran Nomor Pendaftaran Barang (NPB)</p> <p>2.3 Pengawasan mutu barang produk dalam negeri setara dengan mutu produk impor melalui mekanisme pendaftaran Nomor Registrasi Produk (NRP)</p>	3	10	Program Peningkatan Perdagangan Luar Negeri	Kementerian Perdagangan	111,6
			<p>JEJARING KERJA MUTU</p> <p>3.1 Road map kerjasama lembaga penilaian kesesuaian (LPK) baik dalam maupun luar negeri</p>	1	5 ^{k)}			

BIDANG PEMBANGUNAN : PEREKONOMIAN

PRIORITAS : Peningkatan Ekspor

NO	FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN /LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010 - 2014 (Rp. Miliar)
				2010	2014			
			3.2 Jumlah kemampuan Lembaga Penilai Kesesuaian (LPK) yang dipantau	20	100 ^{k)}			
			3.3 Jumlah pejabat fungsional Penguji Mutu Barang (PMB) (orang)	65	325 ^{k)}			
			3.4 Jumlah Penerapan Angka Kredit (PAK) Penguji Mutu Barang (PMB) yang diterbitkan	95	495 ^{k)}			
b.	Pengembangan Standardisasi Bidang Perdagangan (Prioritas Bidang)	Terlaksananya standardisasi bidang perdagangan yang mengacu pada standar internasional	Jumlah rumusan standar barang dan jasa perdagangan	2	2	Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Perdagangan	Kementerian Perdagangan	73,0
			Jumlah negosiasi pada sidang internasional yang terjadwal	18	21			
			Jumlah penyusunan regulasi teknis standardisasi dalam bidang perdagangan	1	5 ^{k)}			
			Pembuatan buku standar contoh karet konvensional (sesuai amanat International Rubber Asosiation - IRA - setiap 2 tahun) (buku)	-	800			
			Penyelesaian pendaftaran Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) (hari)	5	3			
			Persentasi dukungan dan pemahaman publik terhadap Kebijakan Standardisasi Bidang Perdagangan (indeks persepsi stakeholder)	-	80%			
c.	Peningkatan Kerjasama di Bidang Perdagangan Jasa (Prioritas Bidang)	Meningkatnya Kerjasama di Bidang Perdagangan Jasa	Jumlah perundingan bidang jasa yang diikuti	10	30	Program Peningkatan Kerjasama Perdagangan Internasional	Kementerian Perdagangan	20,4
			Jumlah hasil perundingan bidang jasa di forum internasional	3	2			

BIDANG PEMBANGUNAN : PEREKONOMIAN

PRIORITAS : Peningkatan Ekspor

NO	FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN /LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010 - 2014 (Rp. Miliar)
				2010	2014			
d.	Pengembangan Pasar dan Produk di Wilayah Amerika dan Eropa (Prioritas Bidang)	Berkembangnya informasi pasar dan produk ekspor bagi dunia usaha, serta meningkatnya kerjasama dengan instansi terkait di wilayah Amerika dan Eropa	Jumlah promosi dagang internasional yang diikuti	19	36	Program Pengembangan Ekspor	Kementerian Perdagangan	107,2
			Jumlah <i>inquiry</i> yang dihasilkan dari pameran dagang	600	1.560			
			Jumlah peserta yang mengikuti pameran dagang	195	350			
			Jumlah buku petunjuk pasar, profil produk, analisa pasar dan katalog produk yang disusun	19	33			
			Jumlah kerjasama dengan instansi terkait dalam pengembangan produk dan pasar di wilayah Amerika dan Eropa	4	9			
e.	Koordinasi Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	Meningkatnya kualitas koordinasi kebijakan peningkatan dan pengembangan ekspor	Presentase rekomendasi hasil koordinasi kebijakan peningkatan dan pengembangan ekspor yang terimplementasikan	60-70%	95-100%	Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian	Kemenko Perekonomian	11,4
3.	FOKUS : Peningkatan Fasilitas Ekspor	Meningkatnya kelancaran dan kemudahan ekspor	Jumlah perijinan ekspor/impor online	44	81		Kementerian Perdagangan	1.037,5
			Waktu pemrosesan perijinan ekspor/impor	5 HR	1 HR			
			Jumlah pengguna perijinan ekspor/impor online (INA-TRADE)	1500	7500			
a.	Pengelolaan Fasilitas Ekspor dan Impor (Prioritas Nasional)	Tersedianya kebijakan, Koordinasi, Bimbingan Teknis, Monitoring dan Evaluasi di bidang fasilitasi ekspor dan impor	Jumlah penerbitan kebijakan fasilitasi ekspor dan impor (Peraturan)	4	20 ^{k)}	Program Peningkatan Perdagangan Luar Negeri	Kementerian Perdagangan	100,8
			Jumlah pengembangan sistem elektronik bidang fasilitasi pelayanan publik (Kegiatan)	2	2			

BIDANG PEMBANGUNAN : PEREKONOMIAN

PRIORITAS : Peningkatan Ekspor

NO	FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN /LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010 - 2014 (Rp. Miliar)
				2010	2014			
			Jumlah pengguna perijinan ekspor/impor online melalui INATRADE (Perusahaan)	1.500	7.500			
			Jumlah bimbingan teknis bidang fasilitasi perdagangan (Kegiatan)	5	5			
			Jumlah koordinasi bidang fasilitasi perdagangan (Kegiatan)	60	60			
			Jumlah partisipasi sidang - sidang fasilitasi perdagangan didalam dan luar negeri (Kegiatan)	17	17			
			Jumlah laporan evaluasi pelaksanaan monitoring fasilitasi perdagangan (Bahan)	5	5			
b.	Peningkatan Pengamanan dan Perlindungan Akses Pasar (Prioritas Bidang)	Meningkatnya hasil pengamanan dan perlindungan akses pasar	Jumlah submisi/sanggahan atas tuduhan dumping/tuduhan subsidi/tuduhan safeguard	28	30	Program Peningkatan Kerjasama Perdagangan Internasional	Kementerian Perdagangan	34,3

BIDANG PEMBANGUNAN : PEREKONOMIAN

PRIORITAS : Peningkatan Ekspor

NO	FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN /LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010 - 2014 (Rp. Miliar)
				2010	2014			
			Jumlah abstraksi atas non confidential complaint tuduhan dumping, tuduhan subsidi, dan tindakan safeguard	19	20			
			Jumlah profil kasus tuduhan dumping, tuduhan subsidi dan tindakan safeguard	19	20			
c.	Pengelolaan Impor (Prioritas Bidang)	Tersedianya kebijakan, standardisasi, dan bimbingan teknis serta evaluasi di bidang impor	Jumlah rumusan kebijakan/peraturan di bidang impor (PERATURAN)	5	5	Program Peningkatan Perdagangan Luar Negeri	Kementerian Perdagangan	48,0
			Jumlah data dan informasi importasi barang yang diatur tataniaga impornya (JENIS)	3	15 ^{k)}			
			Jumlah penerbitan penetapan importir terdaftar(IT),	4000	5000			
			Jumlah penerbitan pengakuan sebagai Importir Produsen (IP)	2000	2800			
			Jumlah penerbitan surat persetujuan Impor (SPI)	3000	4000			
			Jumlah bimbingan teknis di bidang impor (Kegiatan)	5	9			
			Jumlah laporan evaluasi monitoring pelaksanaan kebijakan impor (Dokumen)	5	25 ^{k)}			
d.	Dukungan Sektor Perdagangan Terhadap Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (Prioritas Nasional)	Meningkatnya peranan sektor perdagangan di Kawasan Ekonomi Khusus	Jumlah PP tentang Kawasan Ekonomi Khusus	1	2	Program Peningkatan Perdagangan Luar Negeri	Kementerian Perdagangan	10,9
			Jumlah kebijakan perdagangan yang dilimpahkan ke KEK (peraturan)	1	5 ^{k)}			

BIDANG PEMBANGUNAN : PEREKONOMIAN

PRIORITAS : Peningkatan Ekspor

NO	FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN /LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010 - 2014 (Rp. Miliar)
				2010	2014			
e.	Perumusan Kebijakan dan Pengembangan Teknologi Informasi Kepabeanaan dan Cukai	1. Terciptanya administrator kepabeanaan dan cukai yang dapat memberikan fasilitasi terbaik berbasis teknologi informasi kepada industri, perdagangan, dan masyarakat serta optimalisasi penerimaan 2. Terwujudnya tingkat pelayanan yang efisien kepada pemangku kepentingan berkaitan dengan layanan berbasis teknologi informasi	1. Persentase sistem aplikasi dan infrastruktur TI yang sesuai dengan proses bisnis DJBC 2. Persentase penyelesaian aplikasi sistem kepabeanaan yang terintegrasi dengan portal NSW 3. PMK untuk pengembangan sistem elektronik terkait dengan perijinan investasi di bidang kepabeanaan dan perpajakan 4. PMK tentang Authorized Economic Operator (AEO) dan dukungan terkait dengan Sistem Logistik Nasional 5. PMK tentang Kawasan Pelayanan Pabean Terpadu (KPPT) dalam rangka pengembangan sistem logistik 6. PMK-PMK tentang pemberian fasilitas fiskal sesuai peraturan perundang-undangan dan skema pembiayaan infrastruktur ke dan di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) 7. PMK untuk memadukan Kawasan Pelayanan Pabean Terpadu (KPPT) dengan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di 5 lokasi (di Jawa dan Sumatra)	100%	100%	Pengawasan, Pelayanan, dan Penerimaan di Bidang Kepabeanaan dan Cukai	Kemenkeu	675,4

BIDANG PEMBANGUNAN : PEREKONOMIAN

PRIORITAS : Peningkatan Ekspor

NO	FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN /LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010 - 2014 (Rp. Miliar)
				2010	2014			
f.	Perumusan Kebijakan dan Bimbingan Teknis Fasilitas Kepabeanan	1. Terciptanya administrator di bidang fasilitas kepabeanan yang dapat memberikan dukungan industry, perdagangan dan masyarakat serta optimalisasi pendapatan 2. Terwujudnya pelayanan yang efisien dan pengawasan efektif	1. Persentase realisasi janji layanan publik terkait pemberian fasilitas pembebasan dan keragaman bea masuk	70%	80%	Pengawasan, Pelayanan, dan Penerimaan di Bidang Kepabeanan dan Cukai	Kemenkeu	133,0
			2. Persentase realisasi janji layanan public terkait pemberian fasilitas pertambangan	70%	80%			
			3. Persentase realisasi janji layanan public terkait pemberian tempat penimbunan berikat (TPB).	70%	80%			
			4. Persentase penyelesaian rancangan PMK dan aturan pelaksanaan lainnya terkait sistem pelayanan kepabeanan yang menunjang Sistem Logistik Nasional (<i>Customs Advance Trade Systems</i>)	-	100%			
			5. Persentase penyelesaian peraturan terkait sistem pelayanan kepabeanan dan cukai di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)	-	100%			
			6. PMK untuk pengembangan sistem elektronik terkait dengan perijinan investasi di bidang kepabeanan dan perpajakan	-	100%			
			7. PMK tentang <i>Authorized Economic Operator</i> (AEO) dan dukungan terkait dengan Sistem Logistik Nasional	-	100%			
			8. PMK-PMK tentang pemberian fasilitas fiskal sesuai peraturan perundang-undangan dan skema pembiayaan infrastruktur ke dan di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)	-	100%			

BIDANG PEMBANGUNAN : PEREKONOMIAN

PRIORITAS : Peningkatan Ekspor

NO	FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN /LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010 - 2014 (Rp. Miliar)
				2010	2014			
			9.PMK untuk memadukan Kawasan Pelayanan Pabean Terpadu (KPPT) dengan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di 5 lokasi (di Jawa dan Sumatra)	-	100%			
g.	Koordinasi Pengembangan dan Penerapan Sistem National Single Window (NSW) dan ASEAN Single Window (ASW)	Meningkatnya Koordinasi di Bidang Pengembangan dan Penerapan NSW dan ASW	Persentase Rekomendasi hasil koordinasi kebijakan di Bidang Pengembangan dan Penerapan NSW dan ASW yang terimplementasikan	80%	95%	Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian	Kemenko Perekonomian	15,6
h.	Koordinasi Pengembangan Kerjasama Ekonomi Dan Pembiayaan Eropa, Afrika Dan Timur Tengah	Meningkatnya koordinasi kerjasama ekonomi dan pembiayaan Eropa, Afrika dan Timur Tengah	Persentase hasil koordinasi di bidang kerjasama ekonomi dan pembiayaan Eropa, Afrika dan Timur Tengah yang terimplementasikan	60-70%	95-100%	Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian	Kemenko Perekonomian	9,7
i.	Koordinasi Pengembangan Kerjasama Ekonomi Dan Pembiayaan Asia	Meningkatnya koordinasi kerjasama ekonomi dan pembiayaan Asia	Persentase rekomendasi hasil koordinasi kebijakan di bidang kerjasama ekonomi dan pembiayaan Asia yang diimplementasikan	60-70%	95-100%	Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian	Kemenko Perekonomian	9,7
4.	Fokus : Pengembangan Industri Pariwisata	Meningkatnya nilai investasi di bidang pariwisata	Persentase investasi bidang pariwisata terhadap investasi nasional	5,19	6,43			213,0
a.	Pengembangan Usaha, Industri dan Investasi Pariwisata	Berkembangnya usaha, industri dan investasi pariwisata	1. Jumlah kebijakan usaha pariwisata (naskah) 2. Jumlah industri/asosiasi pariwisata yang mendapat dukungan 3. Jumlah pola perjalanan (<i>travel pattern</i>) 4. Jumlah profil investasi pariwisata 5. Jumlah UMKM dan industri kreatif bidang pariwisata	8 4 6 5 8	48 ^{k)} 35 ^{k)} 37 ^{k)} 33 ^{k)} 48 ^{k)}	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Kemenbudpar	73,0

BIDANG PEMBANGUNAN : PEREKONOMIAN

PRIORITAS : Peningkatan Ekspor

NO	FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN /LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010 - 2014 (Rp. Miliar)
				2010	2014			
b.	Pengembangan Standardisasi Pariwisata	Terlaksananya penyusunan dan pemutakhiran standard pariwisata serta penerapan standard dan kompetensi pariwisata	1. Jumlah standard kompetensi	8	38 ^{k)}	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Kemenbudpar	140,0
			2. Jumlah standard usaha	6	32 ^{k)}			
			3. Jumlah materi uji kompetensi dan pedoman sertifikasi usaha	8	36 ^{k)}			
			4. Jumlah master assesor dan assesor	1.000	5.000 ^{k)}			
			5. Jumlah Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) dan LSU pariwisata	7	36 ^{k)}			
			6. Jumlah fasilitasi sertifikasi kompetensi (ribu orang)	10	50 ^{k)}			
			7. Jumlah tenaga kerja yang disertifikasi (ribu orang)	10	50 ^{k)}			

BIDANG PEMBANGUNAN : PEREKONOMIAN

PRIORITAS : Peningkatan Ekspor

NO	FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN /LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010 - 2014 (Rp. Miliar)
				2010	2014			
5.	Fokus : Pengembangan Destinasi Pariwisata	Meningkatnya destinasi pariwisata yang berdaya saing tinggi di pasar global	1. Lama tinggal wisatawan (hari): 1. Mancanegara 2. Nusantara 2. Pengeluaran wisatawan harian: 1. Mancanegara (USD) 2. Nusantara (Rp.)	7,8 2,1 1.000 600	7,5 3 2.000 750			1.168,5
a.	Pengembangan Daya Tarik Pariwisata	Meningkatnya kualitas dan kuantitas penataan daya tarik wisata	Jumlah daya tarik wisata alam, bahari dan budaya	7	29	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Kemenbudpar	101,3
b.	Pemberdayaan Masyarakat di Destinasi Pariwisata	Meningkatnya kesadaran dan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan kepariwisataan	1. Jumlah kelompok sadar wisata 2. Jumlah masyarakat sadar wisata (orang)	200 4.000	1.100 ^{k)} 22.000 ^{k)}	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Kemenbudpar	65,0
c.	Peningkatan PNPB Mandiri Bidang Pariwisata	Meningkatnya jumlah desa wisata	Jumlah desa wisata	200	2.000 ^{k)}	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Kemenbudpar	406,0
d.	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Pengembangan Destinasi Pariwisata	Terselenggaranya kegiatan koordinasi perencanaan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan penyusunan kebijakan, peningkatan kualitas SDM aparatur, dan pendudukan teknis dalam meningkatkan kapasitas pengelolaan destinasi pariwisata	1. Jumlah kegiatan pemutakhiran basis data dan informasi destinasi 2. Jumlah Organisasi Pengelolaan Destinasi (Destination Management Organization/ DMO) (buah) 3. Jumlah dukungan fasilitas pariwisata (daya tarik) 4. Jumlah dukungan teknis pengembangan destinasi pariwisata	7 2 7 36	29 15 29 239 ^{k)}	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Kemenbudpar	596,2

BIDANG PEMBANGUNAN : PEREKONOMIAN

PRIORITAS : Peningkatan Ekspor

NO	FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN /LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010 - 2014 (Rp. Miliar)
				2010	2014			
6.	Fokus: Pengembangan Pemasaran dan Promosi Pariwisata	Meningkatnya jumlah wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara	1. Jumlah kunjungan wisman (juta orang)	6,75	8,6			2.437,0
			2. Jumlah pergerakan wisnus (juta perjalanan)	230	276			
a.	Peningkatan Promosi Pariwisata Luar Negeri	Meningkatnya partisipasi pariwisata Indonesia pada bursa, misi penjualan (<i>sales mission</i>) dan festival di tingkat internasional	1. Jumlah partisipasi pada bursa pariwisata internasional, pelaksanaan misi penjualan (<i>sales mission</i>), dan dukungan penyelenggaraan festival (<i>event</i>)	72	361 ^{k)}	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Kemenbudpar	544,6
			2. Jumlah perwakilan promosi pariwisata Indonesia (<i>Indonesia Tourism Promotion Representative Officers</i>) di luar negeri (kota)	12	65 ^{k)}			
b.	Peningkatan Promosi Pariwisata Dalam Negeri	Meningkatnya jumlah <i>event</i> pariwisata dalam negeri	1. Jumlah penyelenggaraan promosi langsung (<i>direct promotion</i>), dan <i>event</i> pariwisata berskala nasional dan internasional.	43	220 ^{k)}	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Kemenbudpar	225,6
			2. Jumlah dukungan <i>event</i> seni, budaya, dan pariwisata daerah (<i>event</i>)	31	162 ^{k)}			
c.	Pengembangan Informasi Pasar Pariwisata	Meningkatnya pemanfaatan informasi pasar pariwisata oleh pelaku pariwisata	1. Jumlah dokumen hasil analisis pasar dalam dan luar negeri (naskah)	23	115 ^{k)}	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Kemenbudpar	211,0
			2. Jumlah penyebaran informasi fokus pasar pariwisata Indonesia (naskah)	640	3.200 ^{k)}			
			3. Jumlah peserta Perjalanan Pengenalan (<i>Familirization Trip/ Fam Trip</i>) sesuai target, jadwal, fokus pasar dan pasar potensial (media atau usaha)	100	550 ^{k)}			

BIDANG PEMBANGUNAN : PEREKONOMIAN

PRIORITAS : Peningkatan Ekspor

NO	FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN /LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010 - 2014 (Rp. Miliar)
				2010	2014			
			4. Jumlah permintaan pasar untuk berkunjung ke Indonesia (transaksi)	8.000	44.000 ^{k)}			
d.	Peningkatan Publikasi Pariwisata	Meningkatnya kelengkapan informasi tujuan pariwisata Indonesia	1. Jumlah destinasi yang memiliki data dan informasi yang lengkap (daerah)	10	50 ^{k)}	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Kemenbudpar	724,7
			2. Jumlah bahan promosi cetak, promosi elektronik, publikasi media cetak, media elektronik dan media luar ruang (ribu buah)	1.150	5.706 ^{k)}			
			3. Jumlah bahan promosi cetak dan promosi elektronik yang didistribusikan (ribu eksemplar)	709	3.544 ^{k)}			
e.	Peningkatan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi, dan Pameran (<i>Meeting, Incentive Travel, Conference, and Exhibition/ MICE</i>)	Meningkatnya penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi, dan Pameran (<i>Meeting, Incentive Travel, Conference, and Exhibition/ MICE</i>) nasional dan internasional di Indonesia	1. Jumlah daerah yang dikembangkan menjadi tujuan wisata MICE (daerah)	5	32 ^{k)}	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Kemenbudpar	229,7
			2. Jumlah promosi penyelenggaraan MICE	12	60 ^{k)}			
			3. Jumlah pendukung penawaran (<i>bidding</i>) dan penyelenggaraan MICE	56	292 ^{k)}			
f.	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Pemasaran	Terselenggaranya kegiatan koordinasi perencanaan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan, penyusunan kebijakan, peningkatan kualitas SDM aparatur, dan dukungan teknis peningkatan pemasaran pariwisata	5. Jumlah event pengembangan kebijakan pemasaran dan promosi pariwisata oleh masyarakat dan daerah	102	476 ^{k)}	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Kemenbudpar	501,4
7.	Fokus: Pengembangan Sumber Daya Pariwisata	Meningkatnya kapasitas sumber daya pembangunan pariwisata	1. Jumlah lulusan pendidikan tinggi kepariwisataan yang terserap di pasar tenaga kerja di dalam maupun luar negeri (orang)	1.241	6.831 ^{k)}			1.158,5
			2. Jumlah penelitian dan pengembangan kepariwisataan	8	50 ^{k)}			

BIDANG PEMBANGUNAN : PEREKONOMIAN

PRIORITAS : Peningkatan Ekspor

NO	FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN /LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010 - 2014 (Rp. Miliar)
				2010	2014			
a.	Pengembangan SDM Kebudayaan dan Pariwisata	Meningkatnya kapasitas sumber daya manusia aparatur/industri dan masyarakat bidang kebudayaan dan pariwisata	Jumlah sumber daya yang dilatih di bidang kebudayaan dan pariwisata (orang)	1.150	5.865 ^{k)}	Program Pengembangan Sumber Daya Kebudayaan dan Pariwisata	Kemenbudpar	34,0
b.	Penelitian dan Pengembangan Bidang Kepariwisataan	Meningkatnya litbang pariwisata dalam mendukung kebijakan pembangunan kepariwisataan	Jumlah penelitian dan pengembangan bidang kepariwisataan	8	50 ^{k)}	Program Pengembangan Sumber Daya Kebudayaan dan Pariwisata	Kemenbudpar	36,0
c.	Pengembangan Pendidikan Tinggi Bidang Pariwisata	Meningkatnya profesionalisme dan daya saing SDM bidang pariwisata di lembaga pendidikan tinggi pariwisata	1. Jumlah program studi	34	42	Program Pengembangan Sumber Daya Kebudayaan dan Pariwisata	Kemenbudpar	1.088,5
			2. Jumlah mahasiswa aktif	4.780	27.030 ^{k)}			
			3. Jumlah dosen	390	500			
			4. Jumlah lulusan pendidikan kepariwisataan di lembaga pendidikan tinggi pariwisata (orang)	1.241	6.831 ^{k)}			
			5. Jumlah penelitian dosen (naskah/laporan)	79	588 ^{k)}			
TOTAL								7.903,1

KETERANGAN :

^{k)} Angka Kumulatif 5 tahun (2010-2014)

**RENCANA TINDAK PRIORITAS BIDANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH TAHUN 2010 - 2014**

PRIORITAS : PENINGKATAN DAYA BELI MASYARAKAT

NO	FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ EMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010 - 2014 (Rp. Miliar)
				2010	2014			
1.	FOKUS : Peningkatan Jaringan Distribusi Untuk Menunjang Pengembangan Logistik Nasional	Meningkatnya efisiensi distribusi barang dan jasa	ranking biaya logistik domestik di Indonesia	92	87		Kementerian Perdagangan	1.109,9
		Menurunnya disparitas harga bahan pokok antar wilayah	rasio variasi harga antar provinsi terhadap variasi harga nasional (standar deviasi/rata-rata harga)	<1	<1			
a.	Peningkatan Kelancaran Distribusi Bahan Pokok (Prioritas Nasional)	Terlaksananya kebijakan dan bimbingan teknis dalam rangka peningkatan kelancaran distribusi dan stabilisasi harga bahan pokok	1.Jumlah rumusan kebijakan dan standar, norma, kriteria dan prosedur di bidang pembinaan pasar dan distribusi (jenis)	6	25 ^{ki)}	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI	Kementerian Perdagangan	226,8
			2.Jumlah pelaku usaha yang mengikuti pembinaan, pelatihan dan bimbingan teknis (orang)	1920	3000			
			3.Persentase rata-rata perbedaan tingkat harga Bahan Pokok antar provinsi di Indonesia	15%	9%			
			4.Persentase ketersediaan barang kebutuhan pokok bagi masyarakat	90%	98%			
			5.Jumlah perizinan di bidang pembinaan pasar dan distribusi yang dilayani secara online	6	11			
			6.Waktu penyelesaian perizinan dan non perizinan di bidang pembinaan pasar dan distribusi (hari)	6	2			
b.	Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan (Prioritas Nasional)	Terbangunnya sarana distribusi dalam rangka kelancaran distribusi barang pokok	1.Jumlah pengembangan pasar percontohan (unit)	13	26	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI	Kementerian Perdagangan	875,5
			2.Jumlah pembangunan pusat distribusi (unit)	-	4 ^{ki)}			
			3.Jumlah rekomendasi penataan sistem distribusi (rekomendasi)	2	6			

PRIORITAS : PENINGKATAN DAYA BELI MASYARAKAT

NO	FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ EMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010 - 2014 (Rp. Miliar)
				2010	2014			
c.	Koordinasi Penataan dan Pengembangan Sistem Logistik Nasional	Terkoordinasinya Pelaksanaan Kebijakan Penataan dan Pengembangan Sistem Logistik Nasional	Persentase Rekomendasi hasil koordinasi Kebijakan Penataan dan Pengembangan Sistem Logistik Nasional yang ditindaklanjuti	60%	85%	Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian	Kemenko Perekonomian	7,6
2.	Fokus : Penguatan Pasar Domestik dan Efisiensi Pasar Komoditi	Meningkatnya aktivitas perdagangan domestik	Pertumbuhan PDB riil subsektor perdagangan besar dan eceran	3,4-3,5%	4,8-7,0%		Kementerian Perdagangan	773,2
a.	Pengembangan Kelembagaan dan Pelaku Usaha Perdagangan (Prioritas Bidang)	Terlaksananya kebijakan dan bimbingan teknis di bidang pembinaan kelembagaan dan pelaku usaha di bidang Perdagangan dalam negeri	1.Jumlah rumusan kebijakan pembinaan usaha, lembaga perdagangan dan pendaftaran perusahaan yang disusun (kebijakan) 2.Jumlah perizinan di bidang usaha perdagangan yang dilayani secara online 3.Waktu penyelesaian perizinan dan non perizinan di bidang usaha perdagangan (hari) 4.Jumlah data dan informasi perusahaan (perusahaan) 5.Jumlah pelaku usaha mengikuti pembinaan, pelatihan dan bimbingan teknis (orang) 6.Jumlah waralaba asing yang terdaftar (berdasarkan jumlah Surat Tanda Pendaftaran Waralaba-STPW yang dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan) 7.Jumlah waralabalokal/UKM yang terdaftar (berdasarkan jumlah Surat Tanda Pendaftaran Waralaba-STPW yang dikeluarkan oleh Disperindag Kabupaten/Kota)	10 6 6 27.500 150 126 51	10 7 2 27.500 300 165 89	Program Pengembangan Dan Pengamanan Perdagangan Dalam Negeri	Kementerian Perdagangan	85,7
b.	Pemberdayaan Dagang Kecil dan Menengah (Prioritas Bidang)	Meningkatnya kreativitas, kapasitas, dan kompetensi UMKM perdagangan	1.Jumlah kebijakan dan pedoman untuk pengembangan usaha UKM mitra binaan (bahan)	4	24 ^{K)}	Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Perdagangan	Kementerian Perdagangan	110,0

PRIORITAS : PENINGKATAN DAYA BELI MASYARAKAT

NO	FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/L EMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010 - 2014 (Rp. Miliar)
				2010	2014			
			2.Jumlah UKM mitra binaan yang diberikan bimbingan teknis, promosi/pemasaran, kemitraan usaha, sarana dagang/sarana usaha produktif, sertifikasi, fasilitasi, pendaftaran serta akses jaringan pembiayaan	1000	1200			
			3.Jumlah UKM yang tercantum pada database PDKM	200	1000			
			4.Jumlah wirausaha baru dalam rangka pemberdayaan masyarakat madani melalui program Bantuan Sarana Usaha Mandiri (BSUM) (UKM)	50	50			
			5.Jumlah kegiatan verifikasi dan evaluasi	6	6			
c.	Pengembangan Ekonomi Kreatif (Prioritas Bidang)	Meningkatnya kontribusi pelaku kreatif (UKM Kreatif dan Insan Kreatif) terhadap PDB Ekonomi Kreatif	1.Persentase PDB ekonomi kreatif terhadap PDB nasional	2%	4%	Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Perdagangan	Kementerian Perdagangan	217,5
			2.Persentase UKM kreatif yang mendapat transaksi bisnis di pameran DN & LN	90%	90%			
			3.Jumlah pelaku ekonomi kreatif yang diberikan promosi/pemasaran, kemitraan, fasilitasi, penghargaan dan akses pembiayaan.(UKM)	400	900			
			4.Persentase pelaku ekonomi kreatif di Indonesia yang tercantum dalam database on-line	20%	20%			
			5.Jumlah brand produk ekonomi kreatif yang dihasilkan	26	93			
d.	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (Prioritas Bidang)	Meningkatnya penggunaan produk dalam negeri	Jumlah promosi produk dalam negeri (kegiatan)	4	6	Program Pengembangan Dan Penguatan Perdagangan Dalam Negeri	Kementerian Perdagangan	221,8
e.	Pembinaan dan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi (Prioritas Bidang)	Meningkatnya hasil pembinaan dan pengawasan terhadap pelaku usaha dibidang perdagangan berjangka komoditi	1.Persentase kepatuhan penyampaian laporan kegiatan pelaku usaha PBK	85%	95%	Program Peningkatan Efisiensi Pasar Komoditi	Kementerian Perdagangan	37,5
			2.Jumlah hari penyelesaian perizinan pelaku usaha PBK setelah dokumen lengkap	32	20			

PRIORITAS : PENINGKATAN DAYA BELI MASYARAKAT

NO	FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ EMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010 - 2014 (Rp. Miliar)
				2010	2014			
			3.Jumlah Peserta Pelatihan Teknis Pelaku Usaha PBK (orang)	120	250			
			4.Persentase kepatuhan pelaksanaan transaksi	85%	95%			
			5.Jumlah pelaku usaha PBK yang diaudit (perusahaan)	12	20			
f.	Pembinaan dan Pengawasan Pasar Lelang (PL) dan Sistem Resi Gudang (SRG)- (Prioritas Bidang)	Meningkatnya hasil pembinaan dan pengawasan Pasar Lelang dan Sistem Resi Gudang	1.Jumlah pengelola SRG	45	95	Program Peningkatan Efisiensi Pasar Komoditi	Kementerian Perdagangan	100,7
			2.Persentase penanganan masalah PL dan SRG	90%	90%			
			3.Jumlah peserta pelatihan teknis penyelenggara PL dan SRG (orang)	150	150			
			4.Jumlah pemantauan dan evaluasi PL dan SRG(kali)	65	100			
			5.Jumlah hari penyelesaian perizinan pelaku usaha SRG setelah dokumen lengkap	32	20			
3.	Fokus : Peningkatan Efektivitas Pengawasan Dan Iklim Usaha Perdagangan	Meningkatnya efektivitas pengawasan dan iklim usaha perdagangan	1.Jumlah penegakan hukum persaingan usaha	252	305		Kementerian Perdagangan dan KPPU	741,6
			2.Waktu penyelesaian perizinan dan non perizinan di bidang perdagangan dalam negeri (hari)	6	2			
			3.Jumlah perizinan perdagangan dalam negeri yang dapat dilayani secara online	12	21			

PRIORITAS : PENINGKATAN DAYA BELI MASYARAKAT

NO	FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTRIAN/ EMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010 - 2014 (Rp. Miliar)
				2010	2014			
a.	Penegakan Hukum Persaingan Usaha	Meningkatnya jumlah kegiatan penegakan hukum persaingan usaha sehingga mampu menciptakan kepastian hukum dan iklim usaha yang lebih kondusif	1.peningkatan jumlah kegiatan penanganan pelaporan	60	80	Program Pengawasan Persaingan Usaha	KPPU	70,1
			2.peningkatan jumlah kegiatan pemberkasan dan penanganan perkara persaingan usaha	140	160			
			3.peningkatan jumlah kegiatan litigasi dan monitoring pelaksanaan Putusan KPPU	50	60			
			4.peningkatan jumlah kegiatan penilaian dan notifikasi terhadap rencana merger, akuisisi, dan konsolidasi	2	5			
b.	Pengembangan dan Harmonisasi Kebijakan Persaingan Usaha	Meningkatnya jumlah kegiatan pengembangan dan harmonisasi kebijakan persaingan usaha yang sehat dalam berbagai kebijakan/ peraturan/regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah guna mendorong efisiensi kinerja perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan rakyat	1.peningkatan jumlah kegiatan monitoring pelaku usaha	30	40	Program Pengawasan Persaingan Usaha	KPPU	47,4
			2.peningkatan jumlah kajian sektor industri dan perdagangan	5	28 ^{K)}			
			3.peningkatan jumlah kegiatan evaluasi kebijakan pemerintah dari perspektif persaingan usaha	16	20			
			4.peningkatan jumlah saran/ pertimbangan yang disampaikan kepada pemerintah/stakeholder	10	14			
			5.peningkatan jumlah perangkat aturan hukum persaingan usaha yang diterbitkan/disahkan	6	32 ^{K)}			
c.	Pengembangan Kebijakan dan Pemberdayaan Perlindungan Konsumen (Prioritas Bidang)	Terlaksananya kebijakan pemberdayaan perlindungan konsumen	1.Jumlah rumusan kebijakan dan standar norma, kriteria dan prosedur di bidang perlindungan konsumen (rumusan)	5	20 ^{K)}	Program Pengembangan dan Pngamanan Perdagangan Dalam Negeri	Kementerian Perdagangan	72,5
			2.Jumlah peserta pelatihan Perlindungan Konsumen yang mengikuti pelatihan (orang)	562	872			
			3.Jumlah Layanan Klinik Konsumen	48	96			
			4.Jumlah forum-forum koordinasi perlindungan konsumen	59	65			
			5.Jumlah sosialisasi Perlindungan Konsumen	43	60			

PRIORITAS : PENINGKATAN DAYA BELI MASYARAKAT

NO	FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTRIAN/L EMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010 - 2014 (Rp. Miliar)
				2010	2014			
			6.Jumlah evaluasi dan pelaporan di bidang Perlindungan Konsumen (laporan)	32	34			
d.	Penguatan Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional (Prioritas Bidang)	Meningkatnya saran dan pertimbangan kepada Pemerintah terkait dengan upaya perlindungan konsumen di Indonesia	1.Jumlah rekomendasi kebijakan dan bahan pertimbangan kepada Pemerintah (rek)	6	42 ¹⁾	Program Pengembangan Dan Pengamanan Perdagangan Dalam Negeri	Kementerian Perdagangan	84,0
			2.Persentase masyarakat yang memahami perlindungan konsumen	2,50%	12,50%			
			3.Persentase kajian dan telaahan yang dipublikasikan	-	60%			
			4. Persentase isu/pengaduan yang ditangani	70%	80%			
			5.Jumlah supervisi kepada LPKSM dalam aspek pengawasan barang dan advokasi konsumen	-	20			
			6.Jumlah jenis dan pemutakhiran database perlindungan konsumen	-	40			
			7.Jumlah kegiatan fasilitasi, pelatihan dan edukasi serta penyebaran informasi perlindungan konsumen	9	21			

PRIORITAS : PENINGKATAN DAYA BELI MASYARAKAT

NO	FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/L EMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010 - 2014 (Rp. Miliar)
				2010	2014			
e.	Peningkatan Tertib Ukur (Prioritas Bidang)	Meningkatnya pelayanan dan pengawasan di bidang metrologi legal	1.Jumlah rumusan kebijakan metrologi legal yang disusun (kebijakan)	8	40 ^{K)}	Program Pengembangan Dan Pengamanan Perdagangan Dalam Negeri	Kementerian Perdagangan	350,6
			2.Jumlah UTP yang memerlukan penanganan khusus yang dapat ditangani untuk ditera dan tera ulang (unit)	8.100	8.100			
			3.Jumlah SDM metrologi legal yang melaksanakan kegiatan metrologi legal seperti tenaga pengamat tera, tenaga penera, tenaga pranata laboratorium, tenaga penguji, PPNS, dan tenaga penyuluh. (orang)	705	1.000			
			4.Jumlah Unit Pelaksana Teknis Daerah yang dinilai dan dibina	20	20			
			5.Jumlah standar milik Unit Pelaksana Teknis dan Unit Pelaksana Teknis Daerah yang telah ditelusur secara nasional	20	20			
			6.Pengadaan Standar dan Peralatan standar BSML di Medan, Makassar, Yogyakarta, dan Banjarmasin (unit)	10	50 ^{K)}			
			7.Jumlah perizinan di bidang kemetrologian yang dilayani secara online	-	3			
			8.Waktu penyelesaian perizinan dan non perizinan di bidang kemetrologian (hari)	-	2			

PRIORITAS : PENINGKATAN DAYA BELI MASYARAKAT

NO	FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/L EMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010 - 2014 (Rp. Miliar)
				2010	2014			
f.	Peningkatan Efektifitas Pengawasan Barang Beredar dan Jasa (Prioritas Bidang)	Meningkatnya efektifitas pengawasan barang dan jasa	1.Jumlah rumusan kebijakan, standar, norma dan pedoman pengawasan barang dan jasa (kebijakan)	11	55 ^{K)}	Program Pengembangan Dan Pengamanan Perdagangan Dalam Negeri	Kementerian Perdagangan	117,0
			2.Jumlah kegiatan pengawasan barang dan jasa	7	7			
			3. Jenis barang beredar ber-SNI wajib yang diawasi (notifikasi WTO)	14	46			
			4.Jumlah kegiatan sosialisasi, serta publikasi peraturan dan hasil pengawasan	5	5			
			5.Jumlah diklat dan bimbingan teknis PPNS-PK dan PPBJ (orang)	180	300			
TOTAL								1.851,5

KETERANGAN :

^{K)} Angka Kumulatif 5 tahun (2010-2014)

RENCANA TINDAK PRIORITAS BIDANG PEREKONOMIAN

BIDANG PEMBANGUNAN: PEREKONOMIAN

PRIORITAS : OPTIMALISASI PENGELUARAN PEMERINTAH DAN PENGELOLAAN KEKAYAAN NEGARA

NO	FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTRIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010 - 2014 (Rp. Miliar)
				2010	2014			
1.	FOCUS : Optimalisasi Anggaran Belanja Pemerintah Pusat	Terlaksananya fungsi penganggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah	Terwujudnya pengelolaan anggaran negara yang tepat waktu, transparan, dan akuntabel	100%	100%			100,5
a.	Pengelolaan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat (ABPP)	Terlaksananya kebijakan penganggaran yang transparan dan akuntabel	1. Pengalokasian belanja pemerintah pusat yang tepat waktu dan efisien 2. Penyediaan anggaran secara tepat waktu dan tepat jumlah untuk menunjang program di bidang pangan, pertanian, dan industri perdesaan sesuai dengan persetujuan 3. PMK No. 261/2008 tentang tatacara penyediaan anggaran, perhitungan, pembayaran, dan pertanggungjawaban subsidi pupuk 4. Dokumen RAPBN-P 2010 tentang perubahan sistem pengelolaan pendanaan BLU Tanah dan <i>Land Capping</i> untuk ditampung dalam APBN-P 2010 5. Peraturan pelaksanaan anggaran R&D berdasarkan program prioritas K/L yang bersangkutan sesuai dengan alokasi anggaran dalam APBN	100%	100%	Pengelolaan Anggaran Negara	Kemenkeu	35,5

PRIORITAS : OPTIMALISASI PENGELUARAN PEMERINTAH DAN PENGELOLAAN KEKAYAAN NEGARA

NO	FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010 - 2014 (Rp. Miliar)
				2010	2014			
b.	Pengembangan Sistem Penganggaran	Terlaksananya penerapan sistem penganggaran berorientasi kinerja dan penerapan MTEF	1. Tersedianya norma penganggaran berbasis kinerja dan penerapan MTEF yang kredibel dan tepat waktu 2. Revisi Keppres 80/2003, usulan mengenai percepatan proses pengadaan barang dan jasa, termasuk dalam angka pinjaman luar negeri	100%	100%	Pengelolaan Anggaran Negara	Kemenkeu	47,4
c.	Penyusunan dan penyampaian laporan keuangan Belanja Subsidi dan Belanja Lain-lain (BSBL)	Tersusunnya Laporan Keuangan BSBL yang transparan dan akuntabel	Laporan Keuangan Belanja Subsidi dan Lain-lain (BSBL) yang lengkap dan tepat waktu	100%	100%	Pengelolaan Anggaran Negara	Kemenkeu	17,6
2.	FOCUS : Pengelolaan Perimbangan Keuangan	1. Peningkatan efektifitas dan efisiensi pengelolaan hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 2. Terciptanya tata kelola yang tertib sesuai peraturan perundang-undangan, transparan, kredibel, akuntabel, dan profesional dalam pelaksanaan hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah	1. Persentase ketepatan jumlah penyaluran dana transfer ke daerah 2. Ketepatan waktu penyelesaian dokumen pelaksanaan penyaluran dana transfer ke daerah 3. Indeks kepuasan Pemda terhadap norma, standar, dan pengelolaan belanja transfer daerah ke pihak eksternal 4. Realisasi janji pelayanan evaluasi Perda/Raperda PDRD ke pihak eksternal dalam bentuk rekomendasi Menteri Keuangan 5. Kajian revisi UU 33/2004 dan PP 54/2005	100%	100%			392,4

PRIORITAS : OPTIMALISASI PENGELUARAN PEMERINTAH DAN PENGELOLAAN KEKAYAAN NEGARA

NO	FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTRIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010 - 2014 (Rp. Miliar)
				2010	2014			
a.	Perumusan kebijakan, bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi di bidang pembiayaan dan kapasitas daerah	1. Peningkatan Efektifitas dan Efisiensi Pengelolaan Pinjaman Daerah, Hibah Daerah, Obligasi Daerah, dan Investasi Daerah	1. Persentase jumlah kebijakan Pembiayaan dan Kapasitas Daerah yang dapat diimplementasikan	100%	100%	Peningkatan Pengelolaan Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah	Kemenkeu	153,4
		2. Peningkatan Efektifitas dan Efisiensi Penataan Daerah	2. Persentase jumlah konsep kebijakan pembiayaan dan kapasitas daerah sesuai dengan rencana	100%	100%			
		3. Peningkatan Kapasitas Aparat Pengelola Keuangan Daerah	3. Persentase kepatuhan dan penegakan ketentuan/peraturan dibidang hibah ke daerah	80%	85%			
b.	Perumusan kebijakan, bimbingan teknis, dan pengelolaan transfer ke Daerah	1. Peningkatan Efektifitas dan Efisiensi Pengelolaan Dana Transfer	1. Persentase ketepatan jumlah penyaluran jumlah dana transfer ke daerah	100%	100%	Peningkatan Pengelolaan Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah	Kemenkeu	86,4
		2. Terciptanya Tata Kelola yang Tertib Sesuai Peraturan Perundang-undangan, Transparan, adil, proporsional, Kredibel, Akuntabel, dan Profesional dalam Pelaksanaan Transfer ke Daerah	2. Ketepatan waktu penyelesaian dokumen pelaksanaan penyaluran dana transfer ke daerah	4 hari	3 hari			
c.	Perumusan kebijakan bimbingan teknis, monitoring, dan evaluasi di bidang PDRD	1. Optimalisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	1. Persentase jumlah kebijakan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dapat diimplementasikan	80%	85%	Peningkatan Pengelolaan Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah	Kemenkeu	68,7
		2. Mewujudkan Kebijakan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang mendukung Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah	2. Realisasi janji pelayanan evaluasi Perda/Raperda PDRD ke pihak eksternal dalam bentuk rekomendasi Menteri Keuangan	15 hari	12 hari			

PRIORITAS : OPTIMALISASI PENGELUARAN PEMERINTAH DAN PENGELOLAAN KEKAYAAN NEGARA

NO	FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010 - 2014 (Rp. Miliar)
				2010	2014			
			3. Evaluasi dan rekomendasi Perda dan Raperda PDRD bermasalah	75%	100%			
			4. Program transisi/pengalihan PBB menjadi Pajak Daerah	-	100%			
			5. Pengalihan BPHTB menjadi Pajak Daerah	-	100%			
			6. Penerapan Pajak Rokok menjadi Pajak Daerah	-	100%			
			7. RPP tentang sistem pemungutan pajak daerah	100%	-			
			8. RPKM pemberian sanksi terhadap daerah yang melanggar ketentuan PDRD	100%	-			
			9. Mengkaji penerapan PBBKB di daerah berkaitan dengan harga dan subsidi BBM	100%	-			
d.	Perumusan kebijakan, pemantauan dan evaluasi di bidang pendanaan daerah dan ekonomi daerah, penyusunan laporan keuangan transfer ke daerah, serta pengembangan sistem informasi keuangan daerah	1. Efisiensi dan Efektifitas Pengelolaan Dana Desentralisasi, Dana Dekonsentrasi, dan Dana Tugas Pembantuan 2. Terkendalinya Defisit Anggaran Daerah	1. Persentase jumlah kebijakan Evaluasi Pendanaan dan Informasi Keuangan Daerah sesuai rencana 2. Persentase penyelesaian laporan hasil evaluasi pendanaan desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan serta perekonomian daerah sesuai rencana	100%	100%	Peningkatan Pengelolaan Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah	Kemenkeu	84,0
		3. Terselenggaranya SIKD Nasional yang TRUST (Complete, Reliable, Up to date, Secure, and Accurate)	3. Persentase tersedianya layanan informasi yang lengkap dan terkini pada website dan Mofisda sesuai yang disampaikan oleh penyaji data	80%	90%			

PRIORITAS : OPTIMALISASI PENGELUARAN PEMERINTAH DAN PENGELOLAAN KEKAYAAN NEGARA

NO	FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010 - 2014 (Rp. Miliar)
				2010	2014			
3.	FOCUS : Pengelolaan Perbendaharaan Negara	Meningkatkan pengelolaan keuangan negara secara profesional, transparan, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan	1. Persentase ketepatan penarikan dana	50%	80%			471,8
			2. Jumlah penerimaan remunerasi atas penyimpanan, penempatan, dan investasi jangka pendek (Idle Cash KUN)	3 Triliun	16,9 ^{K)} Triliun			
			3. Persentase ketepatan penyediaan dana untuk membiayai pengeluaran negara	98%	98%			
			4. Persentase realisasi kontribusi RDI/RPD kepada APBN	100%	100%			
			5. Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat	WDP	WTP			
			6. Jumlah LK K/L dan LK BUN yang mendapat opini WTP/WDP dari BPK	78 K/L & PA BUN WTP:50 WDP:28	83K/L & PA BUN WTP:81 WDP:2			
a.	Pembinaan Pelaksanaan Anggaran dan Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran	Agar pelaksanaan kegiatan dan pencairan dana dapat dilaksanakan sesuai jadwal yang direncanakan	Persentase ketepatan penarikan dana	50%	80%	Pengelolaan Perbendaharaan Negara	Kemenkeu	80,2
b.	Peningkatan Pengelolaan Kas Negara	1. Optimalisasi <i>Idle Cash</i> Pemerintah	1. Jumlah penerimaan remunerasi atas penyimpanan, penempatan, dan investasi jangka pendek (Idle Cash KUN)	3 triliun	16,9 triliun ^{K)}	Pengelolaan Perbendaharaan Negara	Kemenkeu	96,9
		2. Menutup <i>cost of fund</i> pemerintah dalam pembiayaan defisit APBN	2. Persentase ketepatan penyediaan dana untuk membiayai pengeluaran Negara	98%	98%			

PRIORITAS : OPTIMALISASI PENGELUARAN PEMERINTAH DAN PENGELOLAAN KEKAYAAN NEGARA

NO	FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010 - 2014 (Rp. Miliar)
				2010	2014			
		3. Mengukur kinerja pengelolaan kas terkait pelayanan dalam penyaluran dana APBN						
c.	Manajemen Investasi dan Penerusan Pinjaman	Mengoptimalkan penerimaan APBN hasil penerusan pinjaman sehingga mampu mendukung pengelolaan keuangan negara yang berkelanjutan	Persentase realisasi kontribusi RDI/RPD kepada APBN	100%	100%	Pengelolaan Perbendaharaan Negara	Kemenkeu	107,6
d.	Penyelenggaraan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran	1. Menjamin akuntabilitas dan transparansi pertanggungjawaban keuangan negara	1. Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat	WDP	WTP	Pengelolaan Perbendaharaan Negara	Kemenkeu	154,9
		2. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan negara	2. Jumlah LK K/L dan LK BUN yang mendapat opini WTP dan WDP dari BPK	78 K/L& PA BUN WTP:50 WDP:28	83K/L& PA BUN WTP:81 WDP:2			
		3. Pengelolaan Keuangan Kementerian memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK		WDP	WTP			
e.	Penyusunan Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah	1. Tersedianya strategi, kebijakan, dan regulasi di bidang pengadaan umum	1. Jumlah peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan umum	2	7 ^{K)}	Pengembangan Sistem Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)	32,2
		2. Tersosialisasinya strategi, kebijakan, dan regulasi di bidang pengadaan umum	2. Jumlah pihak yang mendapatkan sosialisasi	5	25 ^{K)}			
4.	FOCUS Pengelolaan Kekayaan Negara	Terselenggaranya pengelolaan kekayaan negara, penyelesaian pengurusan Piutang Negara dan pelayanan Lelang yang profesional, tertib, tepat guna, dan optimal serta mampu membangun citra baik bagi stakeholder	1. Jumlah Penerimaan Negara dan penerimaan kembali yang berasal dari pembiayaan APBN					385,4
			- Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara	67,7 Miliar	413,33 ^{K)} Miliar			
			- Bea Lelang	44,04 Miliar	260,01 ^{K)} Miliar			
			- Penerimaan pembiayaan APBN	350 Miliar	1105 ^{K)} Miliar			

PRIORITAS : OPTIMALISASI PENGELUARAN PEMERINTAH DAN PENGELOLAAN KEKAYAAN NEGARA

NO	FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010 - 2014 (Rp. Miliar)
				2010	2014			
			2. Jumlah penyelesaian piutang Negara dan pelayanan lelang					
			- Piutang negara yang dapat diselesaikan	770 Miliar	7109,76 ^{K)} Miliar			
			- Pokok lelang	3, 15 Triliun	18,57 ^{K)} Triliun			
			3.Persentase penyelesaian permohonan pengelolaan kekayaan negara, termasuk pemanfaatan aset idle	68%	87,80%			
			4.Persentase BMN yang disertifikasi	-	90%			
a.	Perumusan kebijakan, standarisasi, bimbingan teknis, evaluasi dan pengelolaan Barang Milik Negara	Terselenggaranya pengelolaan Barang Milik Negara yang professional, tertib, optima, serta akuntabel	1. Persentase formulasi / pembaruan peraturan perundangan di bidang pengelolaan BMN	80%	100%	Pengelolaan Kekayaan Negara, Penyelesaian Pengurusan Piutang Negara, dan Pelayanan Lelang	Kemenkeu	57,0
			2. Persentase penyelesaian permohonan pengelolaan kekayaan Negara, termasuk pemanfaatan aset idle.	70%	82,50%			
			3. Persentase BMN yang akan disertifikasi	-	90%			
			4. Penyelesaian inventarisasi dan penilaian terhadap Barang Milik Negara serta koreksi neraca	-	100%			

PRIORITAS : OPTIMALISASI PENGELUARAN PEMERINTAH DAN PENGELOLAAN KEKAYAAN NEGARA

NO	FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTRIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010 - 2014 (Rp. Miliar)
				2010	2014			
b.	Perumusan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis, evaluasi dan pengelolaan Barang Milik Negara dan Kekayaan Negara yang Dipisahkan	Terselenggaranya pengelolaan barang milik negara dan kekayaan negara yang dipisahkan yang professional, tertib, optimal serta akuntabel	1. Persentase formulasi / pembaruan peraturan perundangan di bidang pengelolaan BMN	55%	100%	Pengelolaan Kekayaan Negara, Penyelesaian Pengurusan Piutang Negara, dan Pelayanan Lelang	Kemenkeu	39,4
			2. Persentase penyelesaian permohonan pengelolaan kekayaan Negara, termasuk pemanfaatan aset idle.	66%	93%			
			3. Persentase BMN yang akan disertifikasi	-	90%			
			4. Persentase penyelesaian pengelolaan dan penatausahaan Kekayaan Negara Dipisahkan	60%	100%			
			5. Penyelesaian inventarisasi dan penilaian terhadap Barang Milik Negara serta koreksi neraca	-	100%			
c.	Perumusan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis, evaluasi dan Pengelolaan Kekayaan Negara Lain-lain	Terselenggaranya pengelolaan kekayaan negara lain lain secara professional, efektif, efisien, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan sekaligus mampu mengoptimalkan penerimaan negara yang berasal dari kekayaan negara lain-lain	1. Jumlah formulasi / pembaharuan peraturan perundangan di bidang pengelolaan kekayaan negara lain-lain\	6	20 ^{K)}	Pengelolaan Kekayaan Negara, Penyelesaian Pengurusan Piutang Negara, dan Pelayanan Lelang	Kemenkeu	289,0
			2. Jumlah penyelesaian berkas kekayaan negara lain lain	1770	3970 ^{K)}			
			3. Jumlah penerimaan kembali (recovery) yang berasal dari pengeluaran pembiayaan APBN	350 Miliar	1105 ^{K)} Miliar			
			4. Penyelesaian inventarisasi dan penilaian terhadap Barang Milik Negara serta koreksi neraca	-	100%			
TOTAL								1.350,1

KETERANGAN :

^{K)} Angka Kumulatif 5 tahun (2010-2014)

RENCANA TINDAK PRIORITAS BIDANG PEREKONOMIAN

BIDANG PEMBANGUNAN: PEREKONOMIAN

PRIORITAS : PENGELOLAAN APBN YANG BERKELANJUTAN

NO	FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010 - 2014 (Rp. Miliar)
				2010	2014			
1.	Perumusan Kebijakan Fiskal, Pengelolaan Pembiayaan Anggaran, dan Pengendalian Resiko	1. Terwujudnya kebijakan fiskal yang <i>sustainable</i> dengan beban risiko fiskal yang terukur dalam rangka stabilisasi dan mendorong pertumbuhan perekonomian 2. Terlaksananya fungsi penganggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah 3. Mengoptimalkan pengelolaan utang pemerintah, baik yang berasal dari Surat Berharga Negara maupun pinjaman dengan biaya dan tingkat risiko yang dikelola dengan baik untuk mendukung kesinambungan fiskal	1. Tingkat akurasi kebijakan fiskal					495,9
			- Rata-rata persentase deviasi asumsi makro	10%	5%			
			- Persentase deviasi target defisit APBN	10%	8%			
			- Persentase deviasi proyeksi pendapatan Negara	4,50%	4%			
			2. Pemenuhan target pembiayaan melalui utang	100%	100%			
			3. Terwujudnya pengelolaan anggaran negara yang tepat waktu, transparan, dan akuntabel	100%	100%			
4. Terpenuhinya struktur portofolio SUN sesuai dengan strategi yang ditetapkan	100%	100%						

PRIORITAS : PENGELOLAAN APBN YANG BERKELANJUTAN

NO	FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010 - 2014 (Rp. Miliar)
				2010	2014			
a.	Perumusan Kebijakan APBN	Tersedianya rekomendasi kebijakan APBN yang <i>sustainable</i> untuk mendukung pembangunan nasional	1. Persentase deviasi target defisit APBN 2. Persentase deviasi proyeksi penerimaan perpajakan 3. Penyempurnaan PMK no.261/2008 tentang tata cara penyediaan anggaran, perhitungan, pembayaran, dan pertanggungjawaban subsidi pupuk 4. Penyempurnaan kebijakan subsidi BBM, listrik dan pupuk agar lebih cepat dan efisien 5. Kajian penerapan PBBKB di daerah berkaitan dengan harga dan subsidi BBM 6. Kajian tentang rasionalisasi subsidi listrik dan subsidi BBM	10% 4,50% - 100% 100% 100%	8% 4% 100% - - -	Program Perumusan Kebijakan Fiskal	Kemenkeu	68,1
b.	Pengelolaan Risiko Fiskal dan Sektor Keuangan	1. Terwujudnya pengelolaan risiko fiskal yang antisipatif dan responsif yang dapat mendukung stabilisasi serta mendorong pertumbuhan perekonomian 2. Tersedianya rekomendasi dan pernyataan risiko fiskal	1. Jumlah risiko fiskal teridentifikasi yang terukur 2. Perubahan sistem pengelolaan pendanaan BLU Tanah dan Land Capping untuk ditampung dalam APBN-P 2010	4 100%	21 ^{k)} -	Program Perumusan Kebijakan Fiskal	Kemenkeu	66,6
c.	Perumusan Kebijakan Ekonomi	Terwujudnya kebijakan ekonomi makro yang antisipatif dan responsif yang dapat mendukung stabilisasi dan mendorong pertumbuhan perekonomian	Persentase rata rata deviasi proyeksi asumsi makro	10%	5%	Program Perumusan Kebijakan Fiskal	Kemenkeu	93,3
d.	Perumusan Kebijakan Pajak, Kepabeanan, Cukai dan PNBPN	Tersedianya rekomendasi dan rumusan kebijakan pendapatan negara yang mendukung terwujudnya kebijakan fiskal	1. Persentase efektifitas kebijakan pendapatan negara	75%	85%	Program Perumusan Kebijakan Fiskal	Kemenkeu	68,0

PRIORITAS : PENGELOLAAN APBN YANG BERKELANJUTAN

NO	FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010 - 2014 (Rp. Miliar)
				2010	2014			
e	Penyusunan Rancangan APBN	Tersusunnya APBN yang sehat, kredibel, dan berkelanjutan	1. Tersusunnya Draft NK, RAPBN, & RUU APBN (APBN-P) dengan besaran yang akurat dan tepat waktu	100%	100%	Pengelolaan Anggaran Negara	Kemenkeu	26,1
			2. Peraturan pelaksanaan anggaran R&D berdasarkan program prioritas K/L yang bersangkutan sesuai dengan alokasi anggaran dalam APBN	100%	-			
			3. Road Map rasionalisasi subsidi listrik	100%	-			
			4. Roap Map rasionalisasi subsidi BBM	100%	-			
			5. RPP tentang penghapusan PNBK	-	100%			
f.	Pengelolaan Pinjaman	Terpenuhinya kebutuhan pembiayaan APBN yang aman melalui pengadaan pinjaman	1. Pemenuhan target pembiayaan melalui pinjaman program	100%	100%	Pengelolaan dan Pembiayaan Utang	Kemenkeu	47,9
			2. Penyelesaian perjanjian pinjaman dan hibah	100%	100%			
g.	Pengelolaan Surat Utang Negara	Terpenuhinya kebutuhan pembiayaan APBN yang aman bagi kesinambungan fiskal melalui pengelolaan Surat Utang Negara (SUN)	1. Pemenuhan target pembiayaan melalui SUN	100%	100%	Pengelolaan dan Pembiayaan Utang	Kemenkeu	44,1
			2. Terpenuhinya struktur portofolio SUN sesuai dengan strategi yang ditetapkan	100%	100%			
h.	Pengelolaan Pembiayaan Syariah	Terpenuhinya kebutuhan pembiayaan APBN yang aman bagi kesinambungan fiskal melalui Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)	1. Pemenuhan target pembiayaan melalui SBSN	100%	100%	Pengelolaan dan Pembiayaan Utang	Kemenkeu	34,0
			2. Terpenuhinya struktur portofolio SBSN sesuai dengan strategi yang ditetapkan	100%	100%			
i.	Pengelolaan Strategi dan Portofolio Utang	Penyediaan strategi pengelolaan utang yang mempertimbangkan aspek biaya dan risiko	1. Tersedianya dokumen Strategi pengelolaan utang	1	6 ^{K)}	Pengelolaan dan Pembiayaan Utang	Kemenkeu	17,7
			2. Pencapaian target effective cost yang kredibel	100%	100%			

PRIORITAS : PENGELOLAAN APBN YANG BERKELANJUTAN

NO	FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010 - 2014 (Rp. Miliar)
				2010	2014			
j.	Pelaksanaan Evaluasi, Akuntansi, dan Setelmen Utang	Terwujudnya pelaksanaan penyelesaian transaksi, pencatatan, dan pelaporan utang pemerintah yang profesional, efektif, transparan, dan akuntabel	1. Pembayaran utang secara tepat waktu, jumlah, dan sasaran 2. Ketersediaan informasi dalam rangka transparansi pengelolaan utang	100%	100%	Pengelolaan dan Pembiayaan Utang	Kemenkeu	30,0
2.	Peningkatan Dan Optimalisasi Penerimaan Negara	1. Terlaksananya fungsi penganggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah 2. Peningkatan penerimaan pajak negara yang optimal 3. Terciptanya administrator kepabeanan dan cukai yang dapat memberikan fasilitasi terbaik kepada industri, perdagangan, dan masyarakat serta optimalisasi penerimaan	1. Terwujudnya pengelolaan anggaran negara yang tepat waktu, transparan, dan akuntabel 2. Persentase realisasi penerimaan pajak terhadap target penerimaan pajak 3. Persentase realisasi waktu pelayanan terhadap janji waktu pelayanan (quick win) 4. Jumlah Penerimaan Bea dan Cukai 5. Persentase penyelesaian rancangan PMK dan aturan pelaksanaan lainnya terkait sistem pelayanan kepabeanan yang menunjang Sistem Logistik Nasional (<i>Customs Advance Trade Systems</i>) 6. Persentase kantor pabean di perbatasan dengan kondisi sarana dan prasarana yang memadai 7. Tersedianya PMK-PMK ttg Pemberian Fasilitas Fiskal sesuai Peraturan Per-UU-an dan skema Pembiayaan Infrastruktur ke & di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) 8. Persentase penyelesaian aplikasi sistem kepabeanan yang terintegrasi dengan portal NSW	100%	100%			3.365,2

PRIORITAS : PENGELOLAAN APBN YANG BERKELANJUTAN

NO	FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010 - 2014 (Rp. Miliar)
				2010	2014			
a.	Pengelolaan PNBPN dan subsidi	Mengoptimalkan keuangan negara di bidang PNBPN dengan tetap menjaga pelayanan kepada masyarakat	1. Tercapainya target penerimaan SDA Migas dan Laba BUMN dalam APBN atau APBN-P 2. Tersusunnya target dan pagu penggunaan PNBPN untuk APBN dan atau APBN-P 3. Terlaksananya pembayaran subsidi energi yang tepat waktu dan jumlah 4. Road Map rasionalisasi subsidi listrik 5. Roap Map rasionalisasi subsidi BBM 6. RPP tentang penghapusan PNBPN 7. Melaksanakan penyempurnaan kebijakan dan peraturan subsidi SOP verifikasi perhitungan subsidi BBM, listrik, dan Pupuk agar lebih cepat dan efisien	95%	100%	Pengelolaan Anggaran Negara	Kemenkeu	38,8
b.	Peningkatan efektivitas pemeriksaan, dan optimalisasi pelaksanaan penagihan	Pemeriksaan dan Penagihan yang optimal untuk peningkatan kepatuhan Wajib Pajak dan Peningkatan Penerimaan Pajak	Persentase jumlah Refund Discrepancy dan Penerimaan Pajak dari Pemeriksaan dan Penagihan terhadap Realisasi Penerimaan Pajak	4%	3%	Peningkatan dan Pengamanan Penerimaan Pajak	Kemenkeu	17,1
c.	Perumusan kebijakan di bidang PPN, PBB, BPHTB, KUP, PPSP, dan Bea Materai	Peningkatan efektifitas pembuatan peraturan	1. Persentase penyelesaian usulan pembuatan / Revisi peraturan perundangan terhadap peraturan perundangan yang harus dibuat / direvisi 2. Tersedianya PMK-PMK ttg Pemberian Fasilitas Fiskal sesuai Peraturan Per-UU-an dan skema Pembiayaan Infrastruktur ke & di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)	100%	100%	Peningkatan dan Pengamanan Penerimaan Pajak	Kemenkeu	12,1
d.	Perumusan kebijakan di bidang PPh dan perjanjian kerjasama perpajakan internasional	Peningkatan efektifitas pembuatan peraturan	1. Persentase penyelesaian usulan pembuatan / Revisi peraturan perundangan terhadap peraturan perundangan yang harus dibuat / direvisi	100%	100%	Peningkatan dan Pengamanan Penerimaan Pajak	Kemenkeu	13,3

PRIORITAS : PENGELOLAAN APBN YANG BERKELANJUTAN

NO	FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010 - 2014 (Rp. Miliar)
				2010	2014			
			2. Tersedianya PMK-PMK ttg Pemberian Fasilitas Fiskal sesuai Peraturan Per-UU-an dan skema Pembiayaan Infrastruktur ke & di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)	-	100%			
			3. Peraturan pelaksanaan mengenai insentif potongan PPh 5% bagi perusahaan yang melakukan R&D	100%	-			
e.	Peningkatan kualitas pelayanan serta efektivitas penyuluhan dan kehumasan	Tingkat Kepuasan yang Tinggi atas Pelayanan Perpajakan	Indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan dan penyuluhan	72	76	Peningkatan dan Pengamanan Penerimaan Pajak	Kemenkeu	344,8
f.	Perencanaan, pengembangan, dan evaluasi di bidang teknologi, komunikasi dan informasi	Teknologi informasi dan komunikasi yang handal dan tepat guna	Persentase penyelesaian pembangunan dan pengembangan sistem informasi terhadap target	100%	100%	Peningkatan dan Pengamanan Penerimaan Pajak	Kemenkeu	772,6
g.	Pelaksanaan reformasi proses bisnis	Proses Bisnis yang efektif dan efisien	1. Persentase penyelesaian SOP terhadap SOP yang harus dibuat	100%	100%	Peningkatan dan Pengamanan Penerimaan Pajak	Kemenkeu	1.397,2
			2. Persentase penyelesaian proses bisnis/ SOP terhadap proses bisnis/SOP yang harus disempurnakan	100%	100%			
h.	Pengelolaan data dan dokumen Perpajakan	Kepuasan yang tinggi dari pengguna data dan dokumen perpajakan	Persentase penyelesaian pemindaian berkas SPT	71%	79%	Peningkatan dan Pengamanan Penerimaan Pajak	Kemenkeu	146,2

PRIORITAS : PENGELOLAAN APBN YANG BERKELANJUTAN

NO	FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010 - 2014 (Rp. Miliar)
				2010	2014			
i.	Perumusan Kebijakan dan Peningkatan Pengelolaan Penerimaan Bea dan Cukai	1. Terciptanya administrasi penerimaan kepabeanan dan cukai yang tertib dan dapat memberikan fasilitasi terbaik kepada industri, perdagangan, dan masyarakat serta optimalisasi penerimaan	1. Jumlah penerimaan bea dan cukai	100%	100%	Pengawasan, Pelayanan, dan Penerimaan di Bidang Kepabeanan dan Cukai	Kemenkeu	19,6
		2. Terwujudnya profesionalisme SDM di bidang penerimaan dan peraturan kepabeanan dan cukai	2. Persentase penyelesaian evaluasi dan rekomendasi, penyempurnaan perancangan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai	70%	80%			
		3. Tercapainya perumusan peraturan di bidang kepabeanan dan cukai	3. Persentase peraturan pelaksanaan di bidang kepabeanan dan cukai yang selaras (tidak bertentangan) dengan perundang-undangan	75%	90%			
		4. Terwujudnya pelayanan yang efisien dan pengawasan yang efektif	4. PMK tentang <i>Authorized Economic Operator</i> (AEO) dan dukungan terkait dengan Sistem Logistik Nasional 5. PMK-PMK tentang pemberian fasilitas fiskal sesuai peraturan perundang-undangan dan skema pembiayaan infrastruktur ke dan di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)	-	100%			
j.	Perumusan Kebijakan dan Bimbingan Teknis Bidang Kepabeanan	1. Terwujudnya profesional SDM di bidang Teknis Kepabeanan	1. Frekuensi pemutahiran Database harga I	12x	60x ^{k)}	Pengawasan, Pelayanan, dan Penerimaan di Bidang Kepabeanan dan Cukai	Kemenkeu	6,6

PRIORITAS : PENGELOLAAN APBN YANG BERKELANJUTAN

NO	FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010 - 2014 (Rp. Miliar)
				2010	2014			
		2. Terciptanya pelayanan yang pasti di bidang kepabeanaan kepada seluruh pemangku kepentingan (stakeholders)	2. Presentase ketepatan waktu penyelesaian penetapan nilai pabean dan klasifikasi barang	75%	80%			
			3. Persentase rumusan peraturan yang menjadi keputusan di bidang teknis kepabeanaan	75%	80%			
			4. PMK untuk pengembangan sistem elektronik terkait dengan perijinan investasi di bidang kepabeanaan dan perpajakan	-	100%			
			5. PMK tentang <i>Authorized Economic Operator</i> (AEO) dan dukungan terkait dengan Sistem Logistik Nasional	-	100%			
			6. PMK tentang Kawasan Pelayanan Kepabeanaan Terpadu (KPPT) dalam rangka pengembangan Sistem Logistik	-	100%			
			7. PMK-PMK tentang Pemberian Fasilitas Fiskal sesuai peraturan perundang-undangan dan skema pembiayaan infrastruktur ke dan di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)	-	100%			
			9. PMK dan Perdirjen mengenai prosedur penetapan nilai pabean termasuk prosedur pengaduan dan keberatan	100%	-			
			10. Penerapan secara konsisten dan pemberian penjelasan kepada pengguna jasa kepabeanaan mengenai SOP tentang penetapan nilai pabean	100%	-			
			11. sistem penanganan pengaduan masyarakat khusus mengenai penetapan nilai pabean	100%	-			

PRIORITAS : PENGELOLAAN APBN YANG BERKELANJUTAN

NO	FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010 - 2014 (Rp. Miliar)
				2010	2014			
k.	Pelaksanaan Pengawasan dan Penindakan atas Pelanggaran Peraturan Perundangan, Intelijen dan Penyidikan Tindak Pidana Kepabeanaan dan Cukai	1. Terciptanya administrator kepabeanaan dan cukai yang dapat memberikan fasilitasi terbaik kepada industri, perdagangan, dan masyarakat serta optimalisasi penerimaan	1. Persentase tindak pidana di bidang kepabeanaan dan cukai yang diserahkan ke kejaksaan	40%	50%	Pengawasan, Pelayanan, dan Penerimaan di Bidang Kepabeanaan dan Cukai	Kemenkeu	596,8
		2. Terciptanya institusi kepabeanaan dan cukai yang dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat	2. PMK tentang Authorized Economic Operator (AEO) dan dukungan terkait dengan Sistem Logistik Nasional	-	100%			
		3. Terwujudnya profesionalisme SDM di bidang intelijen, penindakan dan penyidikan yang handal						
		4. Terwujudnya pengawasan efektif dan pelayanan yang efisien						
3.	Pengelolaan dan Pembinaan BUMN					Kemeneg BUMN	297,7	
a.	Dukungan pelaksanaan program prioritas Pemerintah bidang energi (Prioritas Nasional)	Risalah rapat	Risalah	5	5	Pembinaan BUMN	Kemeneg BUMN	13,8
		Surat persetujuan	Surat	1	1	Pembinaan BUMN	Kemeneg BUMN	
		Laporan hasil monitoring	Laporan	5	5	Pembinaan BUMN	Kemeneg BUMN	
b.	Restrukturisasi BUMN besar / penting / strategis (Prioritas Nasional)	Kajian Restrukturisasi BUMN	Laporan	1	1	Pembinaan BUMN	Kemeneg BUMN	29,2
		Pelaksanaan Restrukturisasi	Laporan	10	10	Pembinaan BUMN	Kemeneg BUMN	20,3
		Monitoring dan Evaluasi	Laporan	6	6	Pembinaan BUMN	Kemeneg BUMN	12,7
e.	Penyusunan best practice GCG	Tersusunnya best practice GCG	paket	1	1	Pembinaan BUMN	Kemeneg BUMN	8,8
f.	Penetapan sistem remunerasi berbasis kinerja di BUMN	Peraturan mengenai sistem remunerasi	Peraturan			Pembinaan BUMN	Kemeneg BUMN	
g.	Penyusunan peraturan mengenai penilaian kinerja di BUMN yang mengacu pada standar internasional	Peraturan mengenai penerapan sistem penilaian yang mengacu kepada standar internasional	Peraturan			Pembinaan BUMN	Kemeneg BUMN	
h.	Kajian, evaluasi dan monitoring pendayagunaan aset BUMN	Inventarisasi dokumen yang terkait dengan pendayagunaan aset	Dokumen	3	3	Pembinaan BUMN	Kemeneg BUMN	16,8
i.	Penetapan target, monitoring, dan evaluasi kinerja BUMN	Risalah rapat RUPS/RPB	Risalah	282	282	Pembinaan BUMN	Kemeneg BUMN	93,5

PRIORITAS : PENGELOLAAN APBN YANG BERKELANJUTAN

NO	FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010 - 2014 (Rp. Miliar)
				2010	2014			
j.	Penetapan peraturan pelaksanaan pemisahan administrasi keuangan PSO dan Perpres tentang SOP pelaksanaan PSO	Peraturan pelaksanaan pemisahan administrasi keuangan PSO dan Perpres tentang SOP pelaksanaan PSO	Peraturan	2		Pembinaan BUMN	Kemeneg BUMN	
k.	Penyusunan peraturan perundangan yang mengarah pada perwujudan pengelolaan BUMN berbasis mekanisme korporasi murni	Terwujudnya harmonisasi peraturan perundangan yang mengarah pada perwujudan pengelolaan BUMN berbasis mekanisme korporasi murni	Peraturan		1	Pembinaan BUMN	Kemeneg BUMN	4,0
l.	Kajian BUMN rugi dan bermasalah	Berkurangnya jumlah BUMN Rugi dan Bermasalah	Laporan	1	1	Pembinaan BUMN	Kemeneg BUMN	25,0
m.	Penyusunan dan pelaksanaan Program Tahunan Privatisasi	Penyusunan Program Tahunan Privatisasi	Laporan	1	1	Pembinaan BUMN	Kemeneg BUMN	10,8
n.	Kajian rightsizing BUMN	Hasil kajian	Laporan	1	1	Pembinaan BUMN	Kemeneg BUMN	4,0
o.	Uji kepatutan dan kelayakan calon Direksi dan Dewan Komisaris	Terpilihnya Direksi dan Komisaris	BUMN	20	20	Pembinaan BUMN	Kemeneg BUMN	25,0
p.	Dukungan pelaksanaan program prioritas Pemerintah bidang ketahanan pangan	Risalah rapat	Risalah	5	5	Pembinaan BUMN	Kemeneg BUMN	18,5
		surat persetujuan	Surat	1	1	Pembinaan BUMN	Kemeneg BUMN	
		Laporan hasil monitoring	Laporan	5	5	Pembinaan BUMN	Kemeneg BUMN	
q.	Dukungan pelaksanaan program prioritas Pemerintah bidang infrastruktur	Risalah rapat	Risalah	5	5	Pembinaan BUMN	Kemeneg BUMN	12,8
		surat persetujuan	Surat	1	1	Pembinaan BUMN	Kemeneg BUMN	
		Laporan hasil monitoring	Laporan	5	5	Pembinaan BUMN	Kemeneg BUMN	
TOTAL								4.158,8

KETERANGAN :

^{k)} Angka Kumulatif 5 tahun (2010-2014)

RENCANA TINDAK PRIORITAS BIDANG PEREKONOMIAN

BIDANG PEMBANGUNAN: PEREKONOMIAN

PRIORITAS : STABILITAS SEKTOR KEUANGAN

NO	FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/L EMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010 - 2014 (Rp. Miliar)
				2010	2014			
I	FOCUS : Peningkatan Ketahanan Dan Daya Saing Sektor Keuangan							375,7
a.	Koordinasi Kebijakan Kredit Usaha Rakyat (KUR)	Meningkatnya Koordinasi Kebijakan Kredit Usaha Rakyat (KUR)	Persentase Rekomendasi hasil koordinasi Kebijakan KUR yang terimplementasikan	60%	80%	Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian	Kemenko Perekonomian	3,1
b.	Koordinasi Penyusunan Skim Pembiayaan Kredit, Asuransi, dan Remitansi untuk Pekerja Migran	Meningkatnya Koordinasi Penyusunan Skim Pembiayaan Kredit, Asuransi, dan Remitansi untuk Pekerja Migran	Persentase Rekomendasi hasil koordinasi Kebijakan Koordinasi Pembiayaan Kredit, Asuransi, dan Remitansi untuk Pekerja Migran yang diimplementasikan	60%	80%	Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian	Kemenko Perekonomian	1,9
c.	Perumusan Peraturan, Penetapan Sanksi dan Pemberian Bantuan Hukum	1. Terciptanya regulasi di bidang Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Non Bank yang mampu menjamin kepastian hukum, adil, dan transparan	1. Persentase jumlah regulasi di bidang pasar modal dan LKNB yang memenuhi asas peraturan perundang-undangan yang baik.	90%	90%	Program Pengaturan, Pembinaan dan Pengawasan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Non Bank	Kemenkeu	27,2
2. Terwujudnya penegakan hukum di bidang Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Non Bank yang obyektif dan efektif		2. Persentase jumlah sanksi administrasi atas pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan Jasa Keuangan yang obyektif.	97%	97%				
3. Terjaganya kredibilitas Bapepam dan LK dengan mengamankan seluruh kebijakan yang telah diambil melalui pelaksanaan Litigasi yang taktis dan efektif.		3. Persentase jumlah perkara/litigasi yang diselesaikan dengan baik.	50%	50%				
d.	Riset Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Non Bank serta Pengembangan Teknologi Informasi	1. Terwujudnya kebijakan berbasis riset dan sistem pengawasan yang berbasis teknologi informasi terhadap industri pasar modal dan jasa keuangan non bank	1. Persentase penyelesaian jumlah laporan hasil riset yang tepat dan akurat di bidang Pasar Modal dan Lembaga Keuangan sesuai rencana	100%	100%	Program Pengaturan, Pembinaan dan Pengawasan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Non Bank	Kemenkeu	25,7

PRIORITAS : STABILITAS SEKTOR KEUANGAN

NO	FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTRIAN/ EMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010 - 2014 (Rp. Miliar)
				2010	2014			
		2. Terwujudnya industri pasar modal dan jasa keuangan non bank yang kredibel sebagai penggerak perekonomian nasional dan berdaya saing global	2. Persentase jumlah sistem yang terimplementasi sesuai dengan rencana	60%	80%			
e.	Pemeriksaan dan penyidikan di bidang Pasar Modal	1. Terciptanya penegakan hukum di bidang pasar modal yang kredibel	1. Persentase Laporan Hasil Pemeriksaan yang dapat diterima oleh Ketua atau Komite Penetapan Sanksi dan Keberatan (KPSK)	80%	90%	Program Pengaturan, Pembinaan dan Pengawasan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Non Bank	Kemenkeu	34,0
		2. Terwujudnya kepastian hukum di bidang Pasar Modal dan memberikan perlindungan bagi pemodal dan masyarakat	2. Persentase penyelesaian perilaku pelaku Pasar Modal yang menyimpang:					
			a. Penyelesaian pelanggaran terhadap kewajiban pelaporan, baik berkala maupun insidental sesuai target waktu (keterlambatan penyampaian pelaporan)	90%	98%			
			b. Penyelesaian pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal yang memerlukan Surat Perintah Pemeriksaan sesuai target waktu	70%	90%			
			c. Penyelesaian pelanggaran terhadap ketentuan pidana di bidang Pasar Modal yang memerlukan Surat Perintah Penyidikan sesuai target waktu	50%	70%			
f.	Pengaturan, Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pengelolaan Investasi	1. Terwujudnya Biro Pengelolaan Investasi sebagai salah satu biro yang kredibel, akuntabel dan transparan	1. Capaian pelaksanaan pemeriksaan dalam satu tahun:			Program Pengaturan, Pembinaan dan Pengawasan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Non Bank	Kemenkeu	20,8
		2. Terwujudnya industri pengelolaan investasi yang tangguh dan berdaya saing global	a. Persentase pemeriksaan kepatuhan terhadap Manajer Investasi sesuai rencana	100%	100%			
			b. Persentase pemeriksaan kepatuhan terhadap Agen Penjual Efek Reksa Dana sesuai rencana	100%	100%			

PRIORITAS : STABILITAS SEKTOR KEUANGAN

NO	FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTRIAN/ EMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010 - 2014 (Rp. Miliar)					
				2010	2014								
			2. Persentase layanan yang memenuhi target SOP:										
			a. Layanan Pendaftaran Reksa Dana yang memenuhi target SOP	100%	100%								
			b. Layanan Perizinan Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana yang memenuhi target SOP	90%	90%								
g.	Pengaturan, Pembinaan dan Pengawasan Bidang Transaksi dan Lembaga Efek	1. Terwujudnya Biro Transaksi dan Lembaga Efek sebagai salah satu biro di Bapepam-LK yang kredibel, akuntabel dan transparan 2. Terwujudnya Lembaga Efek yang berkualitas dan berdaya saing global serta Transaksi Efek yang teratur, wajar dan efisien	1. Persentase lama proses perijinan yang sesuai dengan target SOP. a. Proses perijinan Wakil Perantara Pedagang Efek. b. Proses perijinan Wakil Penjamin Emisi Efek 2. Persentase jumlah pemeriksaan Lembaga Efek yang dilaksanakan dibandingkan dengan yang direncanakan. 3. Persentase tingkat penyelesaian penelaahan hasil pengawasan transaksi efek yang dindikasikan tidak wajar	90%	100%	90%	100%	100%	67%	70%	Program Pengaturan, Pembinaan dan Pengawasan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Non Bank	Kemenkeu	28,1
h.	Penelaahan dan Pemantauan Perusahaan Emiten dan Perusahaan Publik Sektor Jasa	1. Meningkatnya tata kelola Perusahaan yang baik atas Emiten dan Perusahaan Publik Sektor Jasa 2. Meningkatnya jumlah Emiten dan Perusahaan Publik Sektor Jasa	1. Persentase jumlah Laporan Keuangan Tahunan, Laporan Keuangan Tengah Tahunan, dan Laporan Tahunan yang ditelaah sesuai dengan rencana 2. Persentase jumlah pemrosesan Penyataan Pendaftaran sesuai SOP 3. Diterbitkannya produk regulasi terkait penyederhanaan proses dan persyaratan Penawaran Umum	100%	100%	100%	100%	100%		-	Program Pengaturan, Pembinaan dan Pengawasan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Non Bank	Kemenkeu	14,4

PRIORITAS : STABILITAS SEKTOR KEUANGAN

NO	FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTRIAN/ EMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010 - 2014 (Rp. Miliar)
				2010	2014			
i.	Penelaahan dan Pemantauan Perusahaan Emiten dan Perusahaan Publik Sektor Riil	1. Meningkatnya tata kelola perusahaan yang baik atas Emiten dan Perusahaan Publik Sektor Riil	1. Persentase jumlah Laporan Keuangan Tahunan, Laporan Keuangan Tengah Tahunan dan Laporan Tahunan yang ditelaah sesuai dengan rencana	100%	100%	Program Pengaturan, Pembinaan dan Pengawasan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Non Bank	Kemenkeu	14,8
		2. Meningkatnya jumlah Emiten dan Perusahaan Publik Sektor Riil	2. Persentase jumlah pemrosesan Pernyataan Pendaftaran sesuai SOP 3. Diterbitkannya produk regulasi terkait penyederhanaan proses dan persyaratan Penawaran Umum	100%	100%			
j.	Pengaturan dan Pengawasan di bidang Lembaga Pembiayaan dan Penjaminan	1. Membangun otoritas Lembaga Pembiayaan dan Penjaminan yang profesional yang mampu mewujudkan industri jasa pembiayaan dan penjaminan sebagai penggerak ekonomi nasional yang tangguh dan berdaya saing tinggi	1. Persentase jumlah kebijakan di bidang pembiayaan dan penjaminan yang dihasilkan	100%	100%	Program Pengaturan, Pembinaan dan Pengawasan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Non Bank	Kemenkeu	23,5
		2. Terwujudnya industri jasa pembiayaan dan penjaminan yang sehat, kuat dan kompetitif dalam rangka melindungi kepentingan masyarakat	2. Persentase jumlah peraturan di bidang pembiayaan dan penjaminan yang dihasilkan	100%	100%			
		3. Persentase perizinan perusahaan pembiayaan dan penjaminan sesuai SOP	100%	100%				
k.	Pengaturan, Pembinaan, dan Pengawasan bidang Perasuransian	1. Terwujudnya Biro perasuransian yang memegang teguh prinsip akuntabilitas dan integritas	1. Persentase jumlah rumusan peraturan di bidang perasuransian sesuai rencana	100%	100%	Program Pengaturan, Pembinaan dan Pengawasan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Non Bank	Kemenkeu	39,0
		2. Meningkatnya peran dan kualitas pelaku industri perasuransian	2. Persentase layanan pemberian izin usaha asuransi dan reasuransi yang memenuhi target SOP	100%	100%			
		3. Persentase jumlah laporan keuangan perusahaan asuransi dan reasuransi yang telah dianalisis sesuai dengan target waktu	100%	100%				

PRIORITAS : STABILITAS SEKTOR KEUANGAN

NO	FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTRIAN/ EMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010 - 2014 (Rp. Miliar)
				2010	2014			
l.	Pengaturan, Pembinaan, dan Pengawasan Bidang Dana Pensiun	1. Terwujudnya Biro Dana Pensiun sebagai lembaga yang memegang teguh prinsip-prinsip tata kelola yang baik (<i>good government governance</i>)	1. Persentase pengesahan pembentukan dana pensiun yang sesuai dengan SOP	100%	100%	Program Pengaturan, Pembinaan dan Pengawasan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Non Bank	Kemenkeu	34,8
		2. Terwujudnya industri dana pensiun sebagai penopang pembangunan ekonomi nasional dan sarana untuk memenuhi kesejahteraan masyarakat di hari tua	2. Persentase jumlah laporan hasil analisis sesuai rencana 3. Persentase jumlah pemeriksaan langsung sesuai rencana	100%	100%			
m.	Pengembangan Riset dan Analisis Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Pendanaan Terorisme	1. Hasil riset (analisis strategis, tipologi, dan statistik) yang berkualitas dalam upaya pencegahan dan pemberantasan TPPU dan pendanaan terorisme. 2. Hasil analisis yang berkualitas dan bermanfaat bagi penyidik dan instansi pengguna lainnya terkait pencegahan dan pemberantasan TPPU dan pendanaan terorisme	a. Jumlah laporan analisis strategis dan tipologi. b. Persentase informasi hasil riset yang dapat menggambarkan perkembangan, pemetaan, dan modus pencucian uang dan pendanaan terorisme di Indonesia. a. Jumlah laporan hasil analisis yang disampaikan kepada penyidik dan instansi lainnya. b. Persentase hasil analisis awal terhadap seluruh LTKM yang diterima dan telah dikategorikan (<i>high, medium, low</i>).	4 laporan 100%	20 laporan ^{k)} 100%	Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme	PPATK	47,4
n.	Pelaksanaan Kerjasama Nasional dan Internasional di Bidang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU dan pendanaan terorisme.	1. Kerjasama dengan instansi dalam dan luar negeri sebagai upaya penguatan kebijakan anti pencucian uang dan pendanaan terorisme di Indonesia.	a. Jumlah instansi yang secara formal melakukan kerjasama dengan PPATK dalam bentuk Nota Kesepahaman (MoU). b. Persentase terimplementasikannya kerjasama dengan instansi dalam negeri dalam upaya penguatan kebijakan anti pencucian uang dan pendanaan teroris di Indonesia.	4 MOU 70%	20 MOU ^{k)} 80%	Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Teroris	PPATK	35,6

PRIORITAS : STABILITAS SEKTOR KEUANGAN

NO	FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ EMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010 - 2014 (Rp. Miliar)
				2010	2014			
o.	Penelaahan dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pemberian pendapat dan bantuan hukum terkait TPPU dan pendanaan terorisme.	1. Pendapat dan bantuan hukum terkait TPPU dan pendanaan terorisme.	a. Jumlah dokumen pendapat hukum terkait masalah TPPU dan pendanaan teroris maupun masalah terkait lainnya.	24 dokumen	144 dokumen ^{KJ}	Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Teroris	PPATK	32,9
			b. Persentase pemberian pendapat hukum terkait masalah TPPU dan pendanaan teroris maupun masalah terkait lainnya oleh internal dan eksternal PPATK.	100%	100%			
		2. Rancangan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksana terkait masalah TPPU serta rancangan peraturan dan kebijakan internal PPATK.	Jumlah rancangan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksana terkait masalah TPPU, pendanaan teroris dan masalah terkait lainnya serta rancangan peraturan dan kebijakan internal PPATK terkait implementasi UU TPPU dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya	12 dokumen	72 dokumen ^{KJ}			
p.	Pengawasan Kepatuhan terhadap Pihak Pelapor dalam menyampaikan kewajiban pelaporan ke PPATK.	Kepatuhan Pihak Pelapor dalam memenuhi kewajiban penyampaian laporan ke PPATK.	a. Jumlah pelaksanaan audit kepatuhan terhadap Pihak Pelapor.	75 PJK	375 PJK ^{KJ}	Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Teroris	PPATK	12,5
			a. Persentase kesesuaian laporan yang diterima dari Pihak Pelapor dengan pedoman tata cara pelaporan.	99%	100%			
TOTAL								375,7

KETERANGAN :

^{KJ} Angka Kumulatif 5 tahun (2010-2014)

TABEL 2.2
RENCANA TINDAK PRIORITAS BIDANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH TAHUN 2010 - 2014

PRIORITAS : STABILITAS MONETER

NO	FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTRIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010 - 2014 (Rp. Miliar)
				2010	2014			
I.	FOCUS : Peningkatan Stabilitas Rupiah dan nilai Tukar	Meningkatnya Stabilitas Rupiah dan nilai Tukar					Kemenko Perekonomian	109,1
a.	Koordinasi Kebijakan Makro	Meningkatnya koordinasi kebijakan makro yang mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi	Persentase pelaksanaan rencana tindak kebijakan makro yang tepat waktu	50%	75%	Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian	Kemenko Perekonomian	3,0
b.	Koordinasi Kebijakan Pasar Modal, Perbankan Dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Meningkatnya koordinasi kebijakan pasar modal, perbankan dan lembaga keuangan bukan bank yang mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi	Persentase pelaksanaan rencana tindak kebijakan pasar modal, perbankan, dan lembaga keuangan bukan bank yang tepat waktu	60%	80%	Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian	Kemenko Perekonomian	3,5
c.	Koordinasi Kebijakan Ketahanan Pangan	Meningkatnya koordinasi urusan ketahanan pangan	Persentase rekomendasi hasil koordinasi kebijakan bidang ketahanan pangan yang terimplementasikan	50%	90%	Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian	Kemenko Perekonomian	19,5
d.	Koordinasi Kebijakan Bidang Perkebunan dan Hortikultura	Meningkatnya Koordinasi kebijakan di bidang Perkebunan dan Hortikultura	Persentase Rekomendasi hasil koordinasi kebijakan perkebunan dan hortikultura yang diimplementasikan	85%	100%	Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian	Kemenko Perekonomian	11,6
e.	Koordinasi Kebijakan Bidang Pengembangan Urusan Perikanan dan Peternakan	Meningkatnya Koordinasi kebijakan di bidang Pengembangan Urusan Perikanan dan Peternakan	Persentase Rekomendasi hasil kordinasi kebijakan Pengembangan Urusan Perikanan dan Peternakan yang diimplementasikan	85%	100%	Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian	Kemenko Perekonomian	11,8
f.	Koordinasi Pengembangan Kebijakan Pengembangan Bahan Bakar Nabati	Meningkatnya koordinasi kebijakan pengembangan bahan bakar nabati	Persentase rekomendasi kebijakan hasil koordinasi pengembangan bahan bakar nabati yang diimplementasikan	40%	75%	Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian	Kemenko Perekonomian	4,7
g.	Koordinasi Pengembangan Desa Mandiri Energi	Meningkatnya koordinasi pengembangan Desa Mandiri Energi	Persentase rekomendasi hasil koordinasi kebijakan Desa Mandiri Energi yang diimplementasikan	40%	70%	Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian	Kemenko Perekonomian	5,7

PRIORITAS : STABILITAS MONETER

NO	FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/L EMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010 - 2014 (Rp. Miliar)
				2010	2014			
h.	Koordinasi Dan Sinkronisasi Kebijakan Bidang Percepatan Penyediaan Dan Pemanfaatan Energi Alternatif	Meningkatnya koordinasi dan sinkronisasi implementasi kebijakan bidang penyediaan dan pemanfaatan energi alternatif	Persentase rekomendasi hasil Koordinasi Dan Sinkronisasi Kebijakan Bidang Percepatan Penyediaan Dan Pemanfaatan Energi Alternatif yang terimplementasi	50%	90%	Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian	Kemenko Perekonomian	30,0
i.	Koordinasi Pengembangan Urusan Infrastruktur Transportasi	Meningkatnya Koordinasi Urusan Infrastruktur Transportasi	Persentase rekomendasi hasil koordinasi kebijakan Urusan Infrastruktur Transportasi yang terimplementasi	60%	85%	Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian	Kemenko Perekonomian	19,3
TOTAL								109,1

KETERANGAN :

^{k)} Angka Kumulatif 5 tahun (2010-2014)

RENCANA TINDAK PRIORITAS BIDANG PEREKONOMIAN

BIDANG PEMBANGUNAN: PEREKONOMIAN

PRIORITAS BIDANG: Revitalisasi Industri

NO	FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/L EMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010 - 2014 (Rp. Miliar)	
				2010	2014				
I	FOCUS : Penumbuhan Populasi Usaha Industri	Tumbuhnya populasi industri yang kuat dan sehat						2.782,3	
1	Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Kimia Dasar	Tumbuh dan kuatnya struktur industri kimia dasar	Pada akhir tahun 2014, utilisasi kapasitas produksi pulih mencapai 100%	40%	100%	Program Revitalisasi Dan Penumbuhan Basis Industri Manufaktur	Kemenperin	64,0	
			Nilai tambah produk kimia dasar	20%	50%			35,0	
a.	a.Revitalisasi Industri Pupuk (PN5)	Fasilitasi pembangunan restrukturisasi 5 pabrik pupuk urea baru dan 5 pabrik pupuk NPK	Persen Kemajuan	20%	100%			29,0	
	b.	Pengembangan kluster industri berbasis migas, kondesat di Jawa Timur dan Kalimantan Timur (PN8)	Berkembangnya kluster industri berbasis migas	Jumlah Lokasi (Jawa Timur dan Kalimantan)	2	2			
			Entitas Kolaborasi Kluster	152	152				
2	Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Material Dasar dan Permesinan	Tumbuh dan kuatnya struktur industri material dasar permesinan	Pada akhir tahun 2014, utilisasi kapasitas produksi pulih mencapai 100%	40%	100%	Program Revitalisasi Dan Penumbuhan Basis Industri Manufaktur	Kemenperin	1.831,9	
			Meningkatnya jumlah populasi industri material dasar dan permesinan	9	104 ^{K)}				
		Berkembangnya kluster industri baja, listrik, TPT, mesin dan peralatan umum	Jumlah entitas kolaborasi kluster baja, listrik, TPT, mesin dan peralatan umum	123	528				
		Terwujudnya peremajaan permesinan industri	Jumlah perusahaan	158	968 ^{K)}				
3	Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Bahan Bangunan dan Konstruksi	Tumbuh dan kuatnya struktur industri bahan bangunan dan konstruksi	Pada akhir tahun 2014, utilisasi kapasitas produksi pulih mencapai 100%	40%	100%	Program Revitalisasi Dan Penumbuhan Basis Industri Manufaktur	Kemenperin	45,7	
			Meningkatnya jumlah populasi industri bahan bangunan dan konstruksi	100%	105%				

BIDANG PEMBANGUNAN: PEREKONOMIAN

PRIORITAS BIDANG: Revitalisasi Industri

NO	FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTRIAN/L EMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010 - 2014 (Rp. Miliar)
				2010	2014			
a.	Pengembangan Kluster Industri Bahan Bangunan Konstruksi	Berkembangnya kluster industri semen dan industri keramik	Jumlah entitas kolaborasi kluster industri semen dan industri keramik	42	324			
4	Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Aneka dan Alat Pertanian	Tumbuh dan kuat struktur industri aneka dan alat pertanian	Pada akhir tahun 2014, utilisasi kapasitas produksi pulih mencapai 100%	40%	100%	Program Revitalisasi & Penumbuhan Basis Industri Manufaktur	Kemenperin	23,0
			Nilai tambah produk industri aneka dan alat pertanian	100%	120%			
		Berkembangnya kluster industri Alas Kaki	Jumlah entitas kolaborasi kluster	46	226			
5	Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Makanan	Tumbuhnya industri Makanan	Pada akhir tahun 2014, utilisasi kapasitas produksi pulih mencapai 85% sebagaimana sebelum krisis		85%	Program Revitalisasi Dan Penumbuhan Industri Agro	Kemenperin	39,2
a.	Revitalisasi Industri Gula (PNS)	Terlaksananya restrukturisasi 3 perusahaan industri permesinan dalam negeri pendukung PG	Jumlah Pabrik	3	3	Program Revitalisasi Dan Penumbuhan Industri Agro	Kemenperin	9,0
		Fasilitasi pembangunan pabrik gula baru	Jumlah Pabrik	10	11			
b.	Pengembangan Kluster Industri Pengolahan Kelapa, Kakao, dan Gula	Berkembangnya kluster industri pengolahan kelapa, kakao, dan gula	Jumlah instansi dan perusahaan terkait industri kelapa, kakao, dan gula	160	160	Program Revitalisasi Dan Penumbuhan Industri Agro	Kemenperin	30,2
			Beroperasinya masing-masing 1 unit peralatan pengolahan kelapa dan kakao	2	2			
6	Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Hasil Hutan dan Perkebunan	Tumbuh industri Hasil Hutan dan Perkebunan	Pada akhir tahun 2014, utilisasi kapasitas produksi pulih mencapai 85% sebagaimana sebelum krisis		85%			216,8
a.	Pengembangan kluster industri berbasis pertanian, oleochemical di Sumatera Utara, Kalimantan Timur, dan Riau (PNL2)	Berkembangnya kluster industri	Jumlah perusahaan di 3 kawasan	40	100	Program Revitalisasi Dan Penumbuhan Industri Agro	Kemenperin	30,4

BIDANG PEMBANGUNAN: PEREKONOMIAN

PRIORITAS BIDANG: Revitalisasi Industri

NO	FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/L EMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010 - 2014 (Rp. Miliar)
				2010	2014			
			Jumlah kawasan	0	3			
			unit pilot project berbasis hasil samping / limbah sawit	1	1			
b.	Pengembangan Klaster Industri Karet, Kelapa Sawit, Furniture, dan Kertas	Berkembangnya klaster industri karet, kelapa sawit furniture dan kertas	Jumlah instansi dan perusahaan terkait	140	145	Program Revitalisasi Dan Penumbuhan Industri Agro	Kemenperin	109,7
			Mesin peralatan dalam rangka meningkatkan mutu produk karet	2	2			
			Terminal Kayu & Rotan	2	9 ^{K)}			
			Peralatan pensortir kertas bekas		4 ^{K)}			
c.	Pengembangan Industri Bahan Bakar Nabati	Teknologi dan pemanfaatan bahan bakar nabati	Unit Peralatan	4	12 ^{K)}	Program Revitalisasi Dan Penumbuhan Industri Agro	Kemenperin	76,0
7	Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Hasil Laut	Tumbuhnya industri hasil laut	Pada akhir tahun 2014, utilisasi kapasitas produksi pulih mencapai 75% sebagaimana sebelum krisis		75%	Program Revitalisasi Dan Penumbuhan Industri Agro	Kemenperin	33,7
a.	Pengembangan Klaster Industri Pengolahan Ikan	Berkembangnya klaster industri pengolahan ikan	Jumlah instansi dan perusahaan terkait	50	50			4,5
			Peralatan pengolahan ikan	1	5 ^{K)}			11,7
b.	Pengembangan Industri Berbasis Rumput Laut	Berkembangnya industri berbasis rumput laut	Wilayah	3	3			17,5
8	Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Minuman dan Tembakau	Tumbuhnya industri minuman dan tembakau	Pada akhir tahun 2014, utilisasi pulih mencapai 87,5% sebagaimana sebelum krisis		87,50%	Program Revitalisasi Dan Penumbuhan Industri Agro	Kemenperin	71,5
a.	Pengembangan Klaster Industri Pengolahan Tembakau, Buah, Kopi, dan Susu	Berkembangnya klaster industri pengolahan tembakau, buah, kopi, dan susu	Jumlah instansi dan perusahaan terkait industri pengolahan tembakau, buah, kopi dan susu	180	195			23,6

BIDANG PEMBANGUNAN: PEREKONOMIAN

PRIORITAS BIDANG: Revitalisasi Industri

NO	FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTRIAN/L EMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010 - 2014 (Rp. Miliar)
				2010	2014			
			Peralatan peningkatan efisiensi pengolahan tembakau (tungku)	40	50			4,8
			Mesin dan peralatan pengolahan buah	2	6 ^{k)}			5,3
			Mesin dan peralatan pengolahan kopi	2	18 ^{k)}			18,0
			Unit peralatan utk peningkatan mutu susu	5	5			9,8
			Pabrik susu		1			10,0
9	Fasilitasi Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (PN7)	Meningkatnya Fasilitasi Pengembangan Kawasan Zona Industri di 5 KEK	Dokumen Fasilitasi (AMDAL, Engineering Design/DED, dan kelembagaan) di 5 kawasan	5	5	Program Pewilayahan Industri	Kemenperin	32,4
II	FOCUS : Penguatan Struktur Industri	Penumbuhkembangan klaster industri dan pembinaan IKM yang terintegrasi dengan industri skala besar						1.780,8
1	Pengembangan IKM melalui pendekatan Klaster	Meningkatnya kemampuan desain, manajemen dan kreatifitas perajin	Terlaksananya implementasi kolaborasi dan kelembagaan klaster industri garam, fashion dan batik, batu mulia dan perhiasan, gerabah dan keramik hias, minyak atsiri dan makanan ringan yang semakin kuat. Terbentuknya jaringan kerjasama bisnis dan pengembangan Industri Kreatif	22 lokasi	39 lokasi	Program Revitalisasi dan Penumbuhan IKM	Kemenperin	82,9
2	Penyebaran dan Pengembangan IKM di Kawasan Barat Indonesia	Terbinanya Pengembangan IKM di Kawasan Barat Indonesia	Meningkatnya Unit Usaha dan Tenaga Kerja	16 Prov 32 Kab/ Kota	16 Prov 32 Kab/ Kota	Program Revitalisasi dan Penumbuhan IKM	Kemenperin	775,8
			Terbinanya Produk IKM Pangan, Sandang, KBB dan Kerajinan melalui pendekatan OVOP	18 Kab/ Kota di 6 Pro-pinsi	18 Kab/ Kota di 6 Pro-pinsi			

BIDANG PEMBANGUNAN: PEREKONOMIAN

PRIORITAS BIDANG: Revitalisasi Industri

NO	FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTRIAN/L EMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010 - 2014 (Rp. Miliar)
				2010	2014			
3	Penyebaran dan Pengembangan IKM di Kawasan Tengah Indonesia	Terbinanya Pengembangan IKM di Kawasan Tengah Indonesia	Meningkatnya Unit Usaha dan Tenaga Kerja	12 Prop	12 Prop	Program Revitalisasi dan Penumbuhan IKM	Kemenperin	562,3
				28 Kab /Kota	28 Kab /Kota			
			Terbinanya Produk IKM Pangan, Sandang, KBB dan Kerajinan melalui pendekatan OVOP	12 Kab/ Kota di 7 Pro-pinsi	12 Kab/ Kota di 7 Pro-pinsi			
4	Penyebaran dan Pengembangan IKM di Kawasan Timur Indonesia	Terbinanya Pengembangan IKM di Kawasan Timur Indonesia	Meningkatnya Unit Usaha dan Tenaga Kerja	5 Prop	5 Prop	Program Revitalisasi dan Penumbuhan IKM	Kemenperin	247,7
			Terbinanya Produk IKM Pangan, Sandang, KBB dan Kerajinan melalui pendekatan OVOP	8 Kab/ Kota	8 Kab/ Kota			
5	Peningkatan Promosi Investasi dan Pemasaran Industri	Meningkatnya fasilitasi promosi investasi dan pemasaran industri	Jumlah paket promosi investasi (temubisnis, eksibisi, dll)	2	11	Program Kerjasama Industri Internasional	Kemenperin	23,3
6	Pengembangan Standardisasi Industri dan Manajemen HAKI	Meningkatnya RSNI	Jumlah RSNI	100	500 ^{ko}	Program Kebijakan, Iklim Usaha, Mutu, dan Industri Hijau	Kemenperin	48,0
		Meningkatnya hasil litbang yang dipatenkan	Hasil litbang yang dipatenkan	5	25 ^{ko}			19,2
7	Peningkatan Pengelolaan Pelayanan Publik	Meningkatkan profesionalisme aparatur yang tercermin dengan meningkatnya pelayanan kepada pemangku kepentingan dengan lebih cepat, singkat dan transparan	Peningkatan waktu pelayanan	-	95%	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Kemenperin	21,7
a.	Reformasi Birokrasi di Bidang Pelayanan Umum							
III	FOCUS : Peningkatan Produktifitas Industri	Meningkatnya nilai tambah produk melalui penerapan iptek						267,1

BIDANG PEMBANGUNAN: PEREKONOMIAN

PRIORITAS BIDANG: Revitalisasi Industri

NO	FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTRIAN/L EMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010 - 2014 (Rp. Miliar)
				2010	2014			
1	Pengembangan Industri Alat Angkut	Tercapainya penguasaan dan pengembangan teknologi di Bidang Alat Angkut secara berkesinambungan	Jumlah Perusahaan klaster industri kendaraan bermotor	100	200	Program Penumbuhan Industri Unggulan Berbasis Iptek	Kemenperin	148,3
			Jumlah Perusahaan klaster industri perkapalan	75	122			
			Jumlah Perusahaan klaster industri kedirgantaraan	1	1			
			Jumlah Perusahaan klaster industri perkeretaapian	1	1			
2	Pengembangan Industri Elektronika dan Telematika	Tercapainya penguasaan dan pengembangan teknologi di Bidang Telematika secara berkesinambungan	Jumlah Perusahaan dalam klaster industri elektronika	60	100	Program Penumbuhan Industri Unggulan Berbasis Iptek	Kemenperin	118,8
			Jumlah Perusahaan dalam klaster industri telekomunikasi	3	7			
			Jumlah Perusahaan dalam klaster industri komputer	3	7			
			Jumlah Perusahaan dalam klaster industri konten multimedia	5	9			
TOTAL								4.830,2

KETERANGAN :

^{KJ} Angka Kumulatif 5 tahun (2010-2014)

RENCANA TINDAK PRIORITAS BIDANG PEREKONOMIAN

BIDANG PEMBANGUNAN: PEREKONOMIAN

PRIORITAS: Daya Saing Ketenagakerjaan

NO	FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil <i>outcomes</i> /output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010 - 2014 (Rp. Miliar)
				2010	2014			
I.	FOKUS: Peningkatan Kualitas dan Kompetensi Tenaga Kerja	Meningkatkan daya saing dan posisi tawar tenaga kerja	Jumlah tenaga kerja yang kompeten					8.693,2
		Meningkatkan produktivitas tenaga kerja, terutama di sektor industri pengolahan	Biaya tenaga kerja per nilai tambah sektor industri pengolahan					
a.	Pengembangan Standardisasi Kompetensi Kerja dan Program Pelatihan	Tersusunnya standar kompetensi kerja nasional yang sesuai dengan kebutuhan pengguna sektor industri manufaktur dan sektor non-industri manufaktur	Peta kompetensi industri sesuai kebutuhan pengguna		Survey dan pemetaan sektor manufaktur dan non-manufaktur	Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas	Kemnakertrans	458,7
			Jumlah asosiasi profesi yang terlibat penyusunan SKKNI		40% asosiasi profesi			
			Jumlah penetapan SKKNI sesuai peta kompetensi industri		50% SKKNI			
			Jumlah penetapan SKKNI sesuai peta kompetensi non manufaktur termasuk jasa logistik		30% SKKNI			
			Jumlah ketetapan SKKNI yang diterapkan oleh lembaga pelatihan kerja		40% SKKNI			
Tersusunnya harmonisasi peraturan tentang sertifikasi kompetensi tenaga kerja	peraturan kerangka kualifikasi nasional	peraturan kerangka kualifikasi nasional						

BIDANG PEMBANGUNAN: PEREKONOMIAN

PRIORITAS: Daya Saing Ketenagakerjaan

NO	FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil <i>outcomes</i> /output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010 - 2014 (Rp. Miliar)
				2010	2014			
			Jumlah penetapan standar kompetensi dalam kerangka MRA		6 K)			
			Jumlah program pelatihan berbasis kompetensi	50	500 K)			
		Terlaksananya pelatihan berbasis kompetensi	Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi	25.000	370.000 K)			
b.	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan, Sarana dan Pemberdayaan Kelembagaan Pelatihan dan Produktivitas	Diterapkannya tata kelola manajemen yang baik oleh lembaga pelatihan berbasis kompetensi	Tersusunnya standar baku lembaga pelatihan kerja berbasis kompetensi	Rancangan standar baku	Penetapan standar baku dan sosialisasi di 33 provinsi K)	Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas	Kemnakertrans	696,7
			Tersusunnya panduan tata pengelolaan dan pengembangan manajemen lembaga pelatihan	Pedoman manajemen lembaga pelatihan yang berlaku secara nasional	Pedoman manajemen lembaga pelatihan dan sosialisasi di 33 provinsi K)			
			Jumlah lembaga pelatihan kerja yang menerapkan pedoman tata pengelolaan dan pengembangan manajemen lembaga pelatihan		65 K)			
			Jumlah Pemerintah Daerah yang melaksanakan komitmen kesepakatan dan kesepakatan untuk pengembangan lembaga pelatihan berbasis kompetensi	40	65 K)			
			Jumlah BLK yang menyelenggarakan pelatihan berbasis kompetensi	11	43 K)			
			Jumlah BLK yang menerapkan ISO	3	20 K)			
			Jumlah BLK yang diakreditasi sebagai TUK	8	11 K)			
			Jumlah BLK yang ditetapkan sebagai BLU	4	11 K)			
			Jumlah lembaga pelatihan yang terakreditasi	40	120 K)			
			Jumlah BLK yang ditingkatkan kualitasnya	40	65 K)			
c.	Peningkatan Penyelenggaraan Pemagangan Dalam dan Luar Negeri	Terselenggaranya pelatihan melalui pemagangan bersertifikat kompetensi yang berbasis pengguna di dalam dan luar negeri	Jumlah peserta yang mengikuti pemagangan di perusahaan	10.000	50.000 K)	Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas	Kemnakertrans	247,6
			Jumlah peserta pemagangan yang mendapat sertifikat kompetensi	2.500	22.500 K)			

BIDANG PEMBANGUNAN: PEREKONOMIAN

PRIORITAS: Daya Saing Ketenagakerjaan

NO	FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil <i>outcomes</i> /output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010 - 2014 (Rp. Miliar)
				2010	2014			
d.	Peningkatan Kompetensi Instruktur dan Tenaga Keahlian	Meningkatnya kompetensi instruktur dan tenaga kepelatihan	Jumlah instruktur pelatihan berbasis kompetensi yang memiliki sertifikat	% instruktur berbasis kompetensi naik 30%	% instruktur berbasis kompetensi naik 60%	Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas	Kemnakertrans	209,5
			Jumlah manajer BLK berbasis kompetensi yang dilatih	20% manajer BLK	100% manajer BLK			
e.	Pelatihan Kewirausahaan	Terlaksananya pelatihan calon wirausaha baru	Jumlah calon wirausaha baru yang dilatih		40.000 K)	Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas	Kemnakertrans	417,5
f.	Pengembangan dan Peningkatan Produktivitas	Meningkatnya produktivitas tenaga kerja dan perusahaan	Jumlah Tenaga kerja yang ditingkatkan produktivitasnya		47.500 K)	Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas	Kemnakertrans	163,4
			Jumlah kab/kota yang melaksanakan pengukuran produktivitas		110 kab/kota			
g.	Pengembangan SDM Industri *)	Meningkatnya pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku SDM industri	Jumlah SDM industrial yang mengikuti diklat	1.930	14.330	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis lainnya Kementerian Perindustrian	Kemenperin	349,6
		Terwujudnya pendidikan untuk mendukung pengembangan kompetensi inti daerah	Jumlah penyelenggara pendidikan sesuai kompetensi inti daerah	1 unit	9 unit			
		Penguatan kelembagaan pelatihan dan pendidikan	Jumlah unit lembaga diklat yang ditingkatkan sarana dan prasarannya dan mengadopsi tata kelola manajemen yang baik	3 unit	6 unit			
h.	Pengembangan Pendidikan Vokasi Industri *)	Terciptanya SDM industri terampil yang siap kerja	Jumlah lulusan SDM terampil	1.100	7.150	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis lainnya Kementerian Perindustrian	Kemenperin	718,0
		Terciptanya SDM industri madya sesuai dengan kebutuhan industri	Jumlah lulusan ahli madya	1.360	7.670			

BIDANG PEMBANGUNAN: PEREKONOMIAN

PRIORITAS: Daya Saing Ketenagakerjaan

NO	FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil <i>outcomes/output</i> yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010 - 2014 (Rp. Miliar)	
				2010	2014				
i.	Pembinaan Lindungan Lingkungan, Keselamatan Operasi dan Usaha Penunjang Bidang Migas *)	Pembinaan dan Pengawasan Keandalan Infrastruktur, K3, Keselamatan Operasi, dan Lingkungan, serta Usaha Penunjang dan Teknis serta Standardisasi	Jumlah Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (RSKKN) untuk kegiatan usaha migas	3	15 K)	Pengelolaan dan Penyediaan Minyak dan Gas Bumi	Kem ESDM	29,9	
j.	Pembinaan Keselamatan dan Lindungan Lingkungan Ketenagalistrikan serta Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik *)	Meningkatnya pembinaan keselamatan dan lindungan lingkungan ketenagalistrikan	Jumlah standar kompetensi ketenagalistrikan	350	1.750 K)	Pengelolaan Listrik dan Pemanfaatan Energi	Kem ESDM	21,6	
			Jumlah penetapan dan pemberlakuan standar kompetensi	3	15				
			Jumlah sertifikat kompetensi	560	3.100 K)				
			Jumlah Tenaga Teknik yang tersertifikasi	2.180	12.040 K)				
k.	Pembinaan Ketenagalistrikan Lindungan Lingkungan dan Usaha Penunjang Bidang Mineral, Batubara, Panas Bumi dan Air Tanah *)	Tersedianya standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang lindungan lingkungan, keselamatan pertambangan, standardisasi, teknik pertambangan serta usaha jasa pertambangan minerbapabum	Penyusunan rancangan SNI dan SKKNI bidang pertambangan Minerbapabum	5 SNI & 4 SKKNI	25 SNI & 20 K) SKKNI	Pembinaan dan Pengusahaan Mineral, Batubara, Panas Bumi dan Air Tanah	Kem ESDM	27,5	
			Tersedianya inspektur tambang di seluruh Indonesia dan peningkatan kemampuan teknis melalui diklat pusat maupun daerah	Jumlah kompetensi tenaga kerja industri pertambangan minerbapabum melalui sertifikasi	100				750 K)
			Meningkatnya kompetensi KTT dan penanggung jawab kegiatan di lapangan pada IUP (KP)	Jumlah SNI/SKKNI hasil kaji ulang	6				36 K)

BIDANG PEMBANGUNAN: PEREKONOMIAN

PRIORITAS: Daya Saing Ketenagakerjaan

NO	FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil <i>outcomes</i> /output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010 - 2014 (Rp. Miliar)
				2010	2014			
l.	Pendidikan dan Pelatihan Minyak dan Gas Bumi *)	Terwujudnya sumberdaya manusia sub sektor minyak dan gas bumi yang memiliki kompetensi, profesional, berdaya saing tinggi, dan bermoral dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan	Jumlah penyelenggaraan diklat dalam setahun	139	718 K)	Pendidikan dan Pelatihan Energi dan Sumber Daya Mineral	Kem ESDM	701,9
			Jumlah NSPK diklat yang ditetapkan dan diberlakukan	260	1.308 K)			
			Jumlah jenis diklat yang dibutuhkan	1	48 K)			
			Jumlah sarana diklat yang terakreditasi standar mutu	8	40 K)			
			Jumlah kegiatan pelayanan jasa sarana, keahlian, dan sertifikasi	27	149 K)			
m.	Pendidikan dan Pelatihan Ketenagalistrikan dan Energi Baru Terbarukan *)	Terwujudnya sumberdaya manusia sub sektor ketenagalistrikan dan energi baru terbarukan yang memiliki kompetensi, profesional, berdaya saing tinggi, dan bermoral dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan	Jumlah penyelenggaraan diklat dalam setahun	36	203 K)	Pendidikan dan Pelatihan Energi dan Sumber Daya Mineral	Kem ESDM	60,7
			Jumlah NSPK diklat yang ditetapkan dan diberlakukan	12	67 K)			
			Jumlah Lembaga Diklat Profesi/LDP yang terakreditasi sebagai penyelenggara Diklat Teknis	3	29 K)			
			Jumlah jenis diklat yang dibutuhkan	3	15 K)			
n.	Pendidikan dan Pelatihan Geologi *)	Terwujudnya sumberdaya manusia bidang kegeologian yang memiliki kompetensi, profesional, berdaya saing tinggi, dan bermoral dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan	Jumlah penyelenggaraan diklat dalam setahun	40	297 K)	Pendidikan dan Pelatihan Energi dan Sumber Daya Mineral	Kem ESDM	198,9
			Jumlah NSPK diklat yang ditetapkan dan diberlakukan	110	641 K)			
			Jumlah kegiatan pelayanan jasa sarana, keahlian, dan sertifikasi	6	57 K)			
			Jumlah jenis diklat yang dibutuhkan	40	200 K)			
o.	Pendidikan dan Pelatihan Teknologi Mineral, Batubara, dan Panas Bumi *)	Terwujudnya sumberdaya manusia sub sektor mineral, batubara dan panas bumi yang memiliki kompetensi, profesional, berdaya saing tinggi, dan bermoral dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan	Jumlah penyelenggaraan diklat dalam setahun	119	595 K)	Pendidikan dan Pelatihan Energi dan Sumber Daya Mineral	Kem ESDM	185,9

BIDANG PEMBANGUNAN: PEREKONOMIAN

PRIORITAS: Daya Saing Ketenagakerjaan

NO	FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil <i>outcomes</i> /output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010 - 2014 (Rp. Miliar)
				2010	2014			
			Jumlah NSPK diklat yang ditetapkan dan diberlakukan	19	99 K)			
			Jumlah Lembaga Diklat Profesi/LDP yang terakreditasi sebagai penyelenggara Diklat Teknis	1	5 K)			
			Jumlah jenis diklat yang dibutuhkan	5	25 K)			
p.	Pendidikan dan Pelatihan Tambang Bawah Tanah *)	Terwujudnya peningkatan kegiatan pelaksanaan dan pengembangan pendidikan dan pelatihan bidang tambang bawah tanah	Jumlah penyelenggaraan diklat dalam setahun	12	80 K)	Pendidikan dan Pelatihan Energi dan Sumber Daya Mineral	Kem ESDM	54,0
			Jumlah NSPK diklat yang ditetapkan dan diberlakukan	13	86 K)			
			Jumlah Lembaga Diklat Profesi/LDP yang terakreditasi sebagai penyelenggara Diklat Teknis	1	15 K)			
			Jumlah jenis diklat yang dibutuhkan	2	10 K)			
			Jumlah sarana diklat yang terakreditasi standar mutu	-	10 K)			
			Jumlah kegiatan pelayanan jasa sarana, keahlian, dan sertifikasi		6 K)			
q.	Sertifikasi, Standarisasi dan Peningkatan Mutu SDM Kesehatan*)	Terselenggaranya sertifikasi, standarisasi dan peningkatan SDM kesehatan	Jumlah SDM kesehatan di fasilitas kesehatan yang telah ditingkatkan kemampuannya melalui pendidikan berkelanjutan	7.530	42.530 K)	Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan	Kemkes	2.316,0
			Persentase profesi tenaga kesehatan yang memiliki standar kompetensi	30	90			
r.	Pembinaan Keahlian dan Teknologi Konstruksi *)	Terciptanya inovasi dan penerapan teknologi/standar konstruksi karya anak bangsa	Jumlah Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) keahlian konstruksi yang dibina dan dikembangkan	10	50 K)	Pembinaan Konstruksi	Kemen PU	84,8
		Terciptanya SDM ahli konstruksi yang berkompentensi internasional	Jumlah tenaga ahli konstruksi yang dilatih dan bersertifikat	1.000	5.800 K)			
		Terciptanya SDM ahli konstruksi yang bersertifikat	Jumlah tenaga ahli konstruksi yang mengikuti program pemagangan di perguruan tinggi	200	2.700 K)			

BIDANG PEMBANGUNAN: PEREKONOMIAN

PRIORITAS: Daya Saing Ketenagakerjaan

NO	FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil <i>outcomes</i> /output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010 - 2014 (Rp. Miliar)
				2010	2014			
			Jumlah paket kurikulum dan silabus pelatihan keahlian konstruksi yang disusun dan dikembangkan	5	40 K)			
			Jumlah calon pelatih tenaga ahli konstruksi yang dilatih dan bersertifikat	25	375 K)			
s.	Pembinaan Kompetensi dan Pelatihan Konstruksi *)	Meningkatnya kapasitas SDM penyedia/pengguna dan masyarakat jasa konstruksi Terciptanya SDM terampil konstruksi yang bersertifikat Terciptanya balai pelatihan konstruksi yang sesuai standar internasional	Jumlah Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) keterampilan konstruksi yang dibina dan dikembangkan Jumlah tenaga terampil tukang, teknisi peralatan dan perbengkelan jasa konstruksi yang dilatih dan bersertifikat Jumlah paket kurikulum dan silabus pelatihan manajemen teknik (teknisi) konstruksi dan pelatihan keterampilan konstruksi yang disusun dan dikembangkan Jumlah calon pelatih teknisi dan keterampilan konstruksi yang dilatih dan bersertifikat Jumlah balai peningkatan kemampuan dan kompetensi konstruksi yang direvitalisasi	30 6.060 10 175 1	150 K) 31.500 K) 80 K) 875 K) 10 K)	Pembinaan Konstruksi	Kemen PU	278,8
t.	Penelitian dan Pengembangan Literasi dan Profesi*)	Mendorong tumbuhnya iklim penelitian dan pengembangan bidang komunikasi dan informatika serta terbangunnya sumber daya manusia unggul di bidang komunikasi dan informatika	Jumlah standar kompetensi kerja bidang kominfo Jumlah SDM Kominfo yang bersertifikat		40 K) 4.600 K)	Pengembangan dan Penelitian Profesi Kominfo	Kemenkominfo ***)	331,5
u.	Pengembangan pelatihan berbasis kompetensi sektor kelautan dan perikanan *)	Tersusunnya standar kompetensi kerja nasional sektor kelautan dan perikanan yang sesuai dengan kebutuhan pengguna	Jumlah penetapan standar kompetensi sektor kelautan dan perikanan	1	9 K)	Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan	Kemen Kelautan dan Perikanan**)	

BIDANG PEMBANGUNAN: PEREKONOMIAN

PRIORITAS: Daya Saing Ketenagakerjaan

NO	FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil <i>outcomes</i> /output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010 - 2014 (Rp. Miliar)
				2010	2014			
		Terlaksananya pelatihan berbasis kompetensi di lembaga pelatihan kelautan dan perikanan	Jumlah lembaga pelatihan kelautan dan perikanan yang menerapkan tata kelola manajemen yang baik	6	6			
			Jumlah lembaga pelatihan kelautan dan perikanan yang menyelenggarakan pelatihan berbasis kompetensi	6	6			
			Jumlah tempat uji kompetensi (TUK)	10	10			
			Jumlah pusat latihan mandiri kelautan dan perikanan (P2MKP) yang dikembangkan	10	50 K)			
			Jumlah penetapan standar penyelenggaraan pelatihan		32 K)			
			Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi dan tersertifikasi	4.000	20.000 K)			
v.	Pengembangan Sistem Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Profesi	Terbangunnya LSP, TUK, skema sertifikasi yang diakui industri nasional maupun internasional. Terlayannya tenaga kerja agar bersertifikat kompetensi untuk memastikan dan memelihara	Jumlah LSP yang diberi lisensi	70 LSP	760 LSP K)	Pembangunan Sertifikasi Kompetensi Tenaga Kerja	BNSP	203,3
		Jumlah tenaga kerja yang disertifikasi	20.000 orang	164.000 Orang K)				
		Jumlah standar kompetensi yang diverifikasi	70 standar	990 Standar K)				
		Jumlah asesor untuk pelaksanaan uji kompetensi yang ditingkatkan kapasitasnya	500 org	15.000 orang K)				
		Jumlah skema sertifikasi kompetensi yang disusun sesuai dengan permintaan industri	100 skema	1.180 K)				

BIDANG PEMBANGUNAN: PEREKONOMIAN

PRIORITAS: Daya Saing Ketenagakerjaan

NO	FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil <i>outcomes</i> /output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010 - 2014 (Rp. Miliar)
				2010	2014			
w.	Peningkatan kapasitas kelembagaan dan kualitas layanan lembaga keuangan mikro (LKM) termasuk untuk akreditasi dan sertifikasi pelayanan LKM, termasuk LKM yang berbadan hukum koperasi *)	Meningkatnya kapasitas kelembagaan LKM Meningkatnya kapasitas dan kualitas layanan lembaga keuangan mikro (LKM)	Jumlah LKM yang terdaftar dan teakreditasi sesuai ketentuan hukum tentang LKM Jumlah pengelola LKM yang mengikuti pelatihan Jumlah SDM pengelola KSP/KJKS yang bersertifikat Jumlah LDP KJK dan TUK yang diperkuat Jumlah manajer/kepala cabang KJK yang diikutkan diklat dan sertifikasi kompetensi LKM	100	500 K) 4.000 K) 6.000 K) 8 unit K) 4.500 K)	Pemberdayaan Koperasi dan UMKM	Kemenegkop & UKM	22,5
x.	Pemantapan sistem pelatihan pertanian *)	Menumbuhkembangkan kelembagaan pelatihan dan kelembagaan petani Mengembangkan pelatihan non aparatur pertanian	Jumlah kelembagaan UPT Pusat dan P4S yang terakreditasi Jumlah non aparatur pertanian yang ditingkatkan kompetensinya melalui pelatihan	40	2.300 K) 113.004 K)	Pengembangan SDM Pertanian dan Kelembagaan Petani	Kementan**)	
y.	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Darat *)	Tersedianya SDM transportasi darat yang berkompeten dan profesional	Jumlah peserta diklat penjenjangan dan teknis transportasi darat di STTD dan BP2TD	2.758	15.650 K)	Pendidikan dan Pelatihan Perhubungan	Kemenhub	94,0
z.	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Laut *)	Tersedianya SDM transportasi laut yang berkompeten dan profesional	Jumlah peserta diklat penjenjangan dan teknis transportasi laut (STIP, BP3IP, BP2IP/SMK Pelayaran)	72.039	463.727 K)	Pendidikan dan Pelatihan Perhubungan	Kemenhub	711,9
aa.	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Udara *)	Tersedianya SDM transportasi udara yang berkompeten dan profesional	Jumlah peserta diklat penjenjangan dan teknis transportasi udara di STPI, ATPK dan Balai/SMK Penerbangan	1.584	15.962 K)	Pendidikan dan Pelatihan Perhubungan	Kemenhub	108,8
II.	FOKUS: Peningkatan Fasilitas Dan Perlindungan Tenaga Kerja Dalam Rangka Mendukung Mobilitas Tenaga Kerja							2.722,3

BIDANG PEMBANGUNAN: PEREKONOMIAN

PRIORITAS: Daya Saing Ketenagakerjaan

NO	FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil <i>outcomes</i> /output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010 - 2014 (Rp. Miliar)
				2010	2014			
1.	Meningkatkan Pelayanan dan Perlindungan Pekerja Migran ke Luar Negeri	Kemudahan Pengurusan Dokumen Keberangkatan ke LN Penyelesaian Kasus Pekerja Migran	a. Jumlah TKI yang mendapat pelayanan dokumen sesuai standar b. Presentase TKI bermasalah yang mendapat penanganan sesuai prosedur c. Presentase kasus TKI bermasalah yang ditangani					
a.	Regulasi dan Sertifikasi Sistem Elektronik Jasa Aplikasi dan Konten*)	Terbangunnya layanan sistem informasi pasar kerja.	Adanya sistem informasi layanan pekerja migran	a. Electronic Form b. Document Management c. Job Order Management d. Recruitment Management e. Selection Management	Sistem informasi layanan pekerja migran serta operasional dan pemeliharaan ^{*)}	Pengembangan Aplikasi Informatika	Kemenkominfo	10,0

BIDANG PEMBANGUNAN: PEREKONOMIAN

PRIORITAS: Daya Saing Ketenagakerjaan

NO	FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil <i>outcomes</i> /output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010 - 2014 (Rp. Miliar)
				2010	2014			
				f. Security g. Interoperability h. Placement Management i. Campaign Managament j. Operasional				
			Jumlah instansi/lembaga yang terhubung dengan sistem	Kemnakertrans, BNP2TKI, Kemendagri, Kemenhukham, Kemenlu, Depdiknas, Kemenkominfo, Kemkes, , Daerah kantong TKI	Kemnakertrans, BNP2TKI, Kemendagri, Kemenhukham, Kemenlu, Depdiknas, Kemenkominfo, Kemkes, Daerah Kantong TKI, POLRI, Menko Perekonomian, Menko Kesra	Peningkatan Aplikasi dan Layanan Telematika	Kemenkominfo	

BIDANG PEMBANGUNAN: PEREKONOMIAN

PRIORITAS: Daya Saing Ketenagakerjaan

NO	FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil <i>outcomes</i> /output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010 - 2014 (Rp. Miliar)
				2010	2014			
			Adanya infrastruktur SIM pekerja migran	a. Server b. Network c. Koneksi Internet	a. Server b. Network c. Koneksi Internet	Peningkatan Aplikasi dan Layanan Telematika	Kemkominfo	8,0
			Adanya <i>Business Process Reengineering</i>	Business Process Reengineering	Business Process Reengineering	Peningkatan Aplikasi dan Layanan Telematika	Kemkominfo	3,0
			Adanya regulasi berjalanya SIM pekerja migran	Regulasi Pendukung	Regulasi Pendukung	Peningkatan Aplikasi dan Layanan Telematika	Kemkominfo	3,0
b.	Pembinaan Administrasi Pendaftaran Penduduk *)	Tersedianya pelayanan dokumen kependudukan yang cepat, mudah, murah dan aman bagi pekerja migran (TKI)	Jumlah SKPLN (Surat Keterangan Pindah LN) yang diterbitkan sesuai dengan identitas calon pekerja migran	500 ribu pekerja migran	4,5 Juta Pekerja Migran ^{K)}	Penataan Administrasi Kependudukan	Kemendagri	4,6
			Jumlah pekerja migran yang terdaftar di Perwakilan RI/NIK calon pekerja migran	500 ribu pekerja migran	4,5 Juta Pekerja Migran ^{K)}			
c.	Pengelolaan Informasi Kependudukan *)	Tersedianya layanan informasi calon pekerja migran tingkat kecamatan di daerah asal calon pekerja migran	Jumlah pos pelayanan calon pekerja migran tingkat kecamatan di daerah asal calon pekerja migran	Persiapan	6.500 kecamatan ^{K)}	Penataan Administrasi Kependudukan	Kemendagri	16,8
			Jumlah calon pekerja migran yang tercatat di pos pelayanan	500 ribu pekerja migran	4,5 Juta Pekerja Migran ^{K)}			

BIDANG PEMBANGUNAN: PEREKONOMIAN

PRIORITAS: Daya Saing Ketenagakerjaan

NO	FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil <i>outcomes/output</i> yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010 - 2014 (Rp. Miliar)
				2010	2014			
d.	Pelayanan Dokumen Perjalanan Visa dan Fasilitas Keimigrasian*)	Terselenggaranya akses pelayanan paspor yang mudah dan tidak duplikasi	Pelayanan keimigrasian yang transparan	Meningkatnya 20 % pelayanan keimigrasian yang transparan	Meningkatnya 100 % pelayanan keimigrasian yang transparan	Peningkatan Pelayanan dan Pengawasan Keimigrasian	Kemenhukham	49,1
			Persentase penerbitan visa yang memenuhi standar dengan data akurat	Meningkatnya 20% pelayanan penerbitan visa yang memenuhi standar dan akurat	Meningkatnya 100% pelayanan penerbitan visa yang memenuhi standar dan akurat			
			Persentase pemberian paspor TKI TIMUR Tengah yang memenuhi standar	Meningkatnya 20% pelayanan penerbitan paspor yang memenuhi standar	Meningkatnya 100% pelayanan penerbitan paspor yang memenuhi standar			
			Jumlah dan Jenis fasilitas keimigrasian yang diberikan memenuhi standar	Meningkatnya 20% pemberian jumlah dan jenis fasilitas keimigrasian yang memenuhi standar	Meningkatnya 100% pemberian jumlah dan jenis fasilitas keimigrasian yang memenuhi standar			
e.	Pembinaan penempatan dan perlindungan TKI luar negeri	Terintegrasinya pelayanan penempatan calon pekerja migran di daerah	Persentase calon pekerja migran yang terlayani dan tercatat pada dinas tenaga kerja provinsi dan kabupaten/kota	100% calon pekerja migran terlayani	100% calon pekerja migran terlayani	Penempatan dan Perluasan Kerja	Kemnakertrans	130,0

BIDANG PEMBANGUNAN: PEREKONOMIAN

PRIORITAS: Daya Saing Ketenagakerjaan

NO	FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil <i>outcomes</i> /output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010 - 2014 (Rp. Miliar)
				2010	2014			
f.	Fasilitasi Pelayanan Dokumen Calon TKI	Meningkatnya kualitas pelayanan penempatan calon pekerja migran	Jumlah calon pekerja migran yang mendapat layanan dokumentasi sesuai standar	500 ribu pekerja migran	4,5 Juta Pekerja Migran ^{K)}	Peningkatan Fasilitasi Penempatan dan Perlindungan TKI	BNP2TKI	19,4
g.	Penyiapan pemberangkatan	Meningkatnya pemahaman hak dan kewajiban pekerja migran	Persentase jumlah calon pekerja migran yang ditempatkan sesuai dengan job order	100% pekerja migran ditempatkan sesuai dengan job order	100% pekerja migran ditempatkan sesuai dengan job order	Peningkatan Fasilitasi Penempatan dan Perlindungan TKI	BNP2TKI	528,0
			Jumlah calon pekerja migran yang terlayani KTKLN yang dikeluarkan oleh BNP2TKI sesuai dengan NIK	500 ribu pekerja migran	4,5 Juta Pekerja Migran ^{K)}	Peningkatan Fasilitasi Penempatan dan Perlindungan TKI	BNP2TKI	
			Jumlah pekerja migran yang memahami perlindungan dan prinsip-prinsip HAM	500 ribu pekerja migran	4,5 Juta Pekerja Migran ^{K)}			
h.	Pengamanan Keberangkatan	Pencegahan keberangkatan pekerja migran non prosedural	Persentase pekerja migran yang memiliki dokumen resmi bekerja ke luar negeri	100% pekerja migran bekerja dengan dokumen resmi	100% pekerja migran bekerja dengan dokumen resmi	Peningkatan Fasilitasi Penempatan dan Perlindungan TKI	BNP2TKI	15,0
i.	Koordinasi Kebijakan Penyusunan Skim Pembiayaan Kredit, Asuransi, dan Remitansi untuk Pekerja Migran*)	Meningkatnya koordinasi kebijakan penyusunan skim pembiayaan kredit, asuransi, dan remitansi untuk pekerja migran	Persentase rekomendasi kebijakan koordinasi pembiayaan kredit, asuransi, dan remitansi untuk pekerja migran yang diimplementasikan	60%	80%	Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian	Menko Perekonomian	1,9

BIDANG PEMBANGUNAN: PEREKONOMIAN

PRIORITAS: Daya Saing Ketenagakerjaan

NO	FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil <i>outcomes</i> /output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010 - 2014 (Rp. Miliar)
				2010	2014			
j.	Pembinaan Penempatan dan Perlindungan TKI Luar Negeri	Tersedianya regulasi yang melindungi pekerja migran	Ratifikasi konvensi buruh migran dan keluarganya	1 Ratifikasi konvensi	Ratifikasi Konvensi Buruh migran	Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja	Kemnakertrans	490,8
			Amandemen UU 39/2004	Persiapan Amandemen UU	Amandemen UU			
			Persentase peraturan turunan amandemen UU		100% Peraturan turunan tersusun ^{*)}			
			Jumlah perjanjian penempatan MoU dengan negara tujuan	10 MoU	17 MoU ^{*)}			
			Persentase calon pekerja migran yang terlayani dan tercatat pada dinas tenaga kerja provinsi dan kabupaten	100% calon pekerja migran terlayani	100% calon pekerja migran terlayani			
		Tersedianya Sistem Komputerisasi Tenaga Kerja Luar Negeri (Sisko TKLN)	14 Embarkasi	14 Embarkasi				
		Jumlah atase ketenagakerjaan yang memberikan perlindungan pekerja migran	13 Atase	13 Atase				

BIDANG PEMBANGUNAN: PEREKONOMIAN

PRIORITAS: Daya Saing Ketenagakerjaan

NO	FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil <i>outcomes</i> /output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010 - 2014 (Rp. Miliar)
				2010	2014			
k.	Peningkatan Perlindungan dan Pelayanan WNI/BHI di Luar Negeri*)	Tersedianya bantuan hukum bagi kepentingan pekerja migran	Jumlah pertemuan dengan negara sahabat terkait perlindungan WNI/BHI dengan negara lain	5 kali	35 kali ^{K)}	Peningkatan Kualitas Pelayanan Keprotokolan dan Kekonsuleran	Total Kemenlu Kemenlu Kemenlu Kemenlu Kemenlu	1.120,3
			Jumlah <i>Citizen Services</i> yang diperkuat	24 Citizen Services	24 Citizen Services			
			Jumlah WNI/TKI yang memperoleh fasilitas penampungan		14.998			
			Persentase TKI yang terkena masalah hukum mendapat bantuan hukum (advokasi dan <i>lawyer</i>) bagi TKI		100%			
			Jumlah WNI/TKI yang dideportasi		24.020 ^{K)}			
l.	Pelayanan Advokasi dan Perlindungan Hukum	Terlaksananya pelayanan advokasi dan perlindungan hukum TKI	Kemudahan penyampaian pengaduan	-	1 <i>hotline services</i> 24 jam (bebas pulsa)	Peningkatan Fasilitas Penempatan dan Perlindungan TKI	BNP2TKI	135,0
			Jumlah pengaduan yang ditangani	100% pengaduan tertangani	100% pengaduan tertangani			

BIDANG PEMBANGUNAN: PEREKONOMIAN

PRIORITAS: Daya Saing Ketenagakerjaan

NO	FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil <i>outcomes</i> /output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010 - 2014 (Rp. Miliar)
				2010	2014			
			Kualitas pelayanan <i>hotline service</i>		100% pekerja migran yang diproses melalui <i>hotline service</i> dalam waktu 24 jam			
			Jumlah orang yang berminat bekerja ke luar negeri yang mendapat advokasi		100% orang yang berminat menjadi pekerja migran teradvokasi			
			Persentase pekerja migran purna bermasalah yang direhabilitasi	60% pekerja migran bermasalah ditangani	100% pekerja migran bermasalah ditangani			
m.	Peningkatan Pemberdayaan TKI Purna	Meningkatnya kesadaran pengelolaan remitansi untuk kegiatan produktif	Jumlah pekerja calon migran/purna yang mendapat edukasi pengelolaan remitansi	2000 pekerja migran	17.000 pekerja migran	Peningkatan Fasilitas Penempatan dan Perlindungan TKI	BNP2TKI	8,6
n.	Peningkatan Pemulangan Pekerja Migran Bermasalah/TKIB*)	Terlayannya pemulangan pekerja migran bermasalah/TKIB yang dideportasi secara sehat dan bermartabat.	Terselenggaranya koordinasi pemulangan Pekerja migran/TKI B dari entry point ke daerah asal	Rapat koordinasi	Rapat koordinasi	Pengembangan Kebijakan Bidang Kesra	Menko Kesra	4,3
o.	Peningkatan Pelayanan Pemulangan Pekerja Migran Bermasalah/TKIB*)	Terlayannya pemulangan pekerja migran bermasalah/TKIB yang dideportasi sampai di daerah asal	Jumlah pemulangan pekerja migran bermasalah/TKIB yang dideportasi	100% TKIB dipulangkan ke daerah asal	100% TKIB dipulangkan ke daerah asal	Perlindungan dan Jaminan Sosial	Kemensos	123,3

BIDANG PEMBANGUNAN: PEREKONOMIAN

PRIORITAS: Daya Saing Ketenagakerjaan

NO	FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil <i>outcomes</i> /output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010 - 2014 (Rp. Miliar)
				2010	2014			
p.	Peningkatan Ketenteraman, Ketertiban, dan Perlindungan Masyarakat *)	Terselenggaranya ketentraman dan ketertiban umum di lokasi debarkarsi dan embarkasi	Kesiapsiagaan satgas <i>entry</i> /transit/daerah asal	100% TKIB deportasi terlayani	100% TKIB deportasi terlayani	Penguatan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Kemendagri	28,8
r.	Peningkatan Keamanan Pemulangan Pekerja Migran Bermasalah/TKIB*)	Tersedianya pengamanan pemulangan pekerja migran bermasalah	Terjaminnya keamanan pemulangan pekerja migran bermasalah/TKIB	100% kasus kriminal dan Polmas tertangani	100% kasus kriminal dan Polmas tertangani	Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban	POLRI	22,5
III.	FOKUS: Perbaikan Iklim Ketenagakerjaan dan Penguatan Hubungan Industrial	Meningkatkan daya saing dan posisi tawar tenaga kerja	Jumlah tenaga kerja yang kompeten					1.010,5
a.	Penyempurnaan Peraturan Ketenagakerjaan	Tersusunnya peraturan yang dapat mendorong penciptaan kesempatan kerja dan memperkuat lembaga hubungan industrial	Tersusunnya Peraturan bidang HI yang meliputi pengaturan tentang kompensasi dan penetapan PHK, hubungan kerja (PKWT & <i>outsourcing</i>), pengupahan, perlindungan pekerja, mogok kerja	Naskah akademik	Amandemen, ^{K)} UU, peraturan pelaksanaan, sosialisasi, konsolidasi	Pengembangan Hubungan Industrial dan Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Kemnakertrans	182,0
		Peraturan tentang organisasi pekerja/buruh			Amandemen, ^{K)} UU, peraturan pelaksanaan, sosialisasi, konsolidasi			
		Peraturan tentang penyelesaian hubungan Industrial			Amandemen, ^{K)} UU, peraturan pelaksanaan, sosialisasi, konsolidasi			
		Terbangunnya kebijakan ketenagakerjaan pusat dengan kebijakan peraturan daerah secara sinergis	Harmonisasi kebijakan jaminan sosial		4 rancangan naskah ^{K)}			

BIDANG PEMBANGUNAN: PEREKONOMIAN

PRIORITAS: Daya Saing Ketenagakerjaan

NO	FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil <i>outcomes</i> /output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010 - 2014 (Rp. Miliar)
				2010	2014			
			Selarasnya peraturan bidang HI	Inventarisasi Perda HI	Inventarisasi Perda HI, review & assesment, sosialisasi dan konsolidasi dengan Pemda ^{K)}			
b.	Pengelolaan Kelembagaan dan Pemasyarakatan Hubungan Industrial	Tercapainya kesepakatan dalam hubungan kerja	Mekanisme perundingan secara bipartit, pencatatan, keterwakilan dan verifikasi SP/SB	2 naskah	4 Naskah ^{K)}	Pengembangan Hubungan Industrial dan Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Kemnakertrans	368,5
		Jumlah lembaga kerjasama (LKS) bipartit di perusahaan		naik 5%	% LKS bipartit di perusahaan naik 20% dari 2010			
		Jumlah perwakilan pekerja, SP/SB & pengusaha yang mendapat pendidikan teknik bernegosiasi		500	5.000 ^{K)}			
		Jumlah pembentukan LKS tripartit kabupaten/ kota		49	242 ^{K)}			
		Jumlah anggota LKS bipartit dan tripartit yang diberdayakan		160	1.800 ^{K)}			
		Jumlah SDM yang memahami HI		3.000	30.000 ^{K)}			
		Tersusunnya SKKNI ahli HI		Inventarisasi kompetensi	Inventarisasi kompetensi, pemetaan dan penerapan SKKNI AHI ^{K)}			

BIDANG PEMBANGUNAN: PEREKONOMIAN

PRIORITAS: Daya Saing Ketenagakerjaan

NO	FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil <i>outcomes</i> /output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010 - 2014 (Rp. Miliar)
				2010	2014			
c.	Peningkatan Penerapan K3	Diterapkannya manajemen dan standar K3 Menurunnya jumlah kecelakaan dan penyakit akibat kerja	Jumlah perusahaan yang menerapkan manajemen K3	% perusahaan naik 10%	% perusahaan naik 50% dari 2010	Perlindungan Tenaga kerja dan Pengembangan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan	Kemnakertrans	460,0
			Jumlah tenaga pengawas K3 yang memenuhi standar kompetensi	20% tenaga pengawas K3 bersertifikat kompetensi	65% pengawas K3 bersertifikat kompetensi			
			Persentase tenaga pengawas yang ditingkatkan kapasitasnya		100% tenaga pengawas ditingkatkan kapasitasnya			
TOTAL								12.425,9

KETERANGAN :

^{K)} Angka Kumulatif 5 tahun (2010-2014)

*)Kegiatan ini masuk ke dalam Tabel 2.3 dan/atau Renstra K/L terkait

**) Kegiatan ini sudah dianggarkan di Tabel 2.3 K/L terkait

**) Alokasi anggaran juga digunakan untuk membiayai pemenuhan indikator lain dalam kegiatan ini

RENCANA TINDAK PRIORITAS BIDANG PEREKONOMIAN

BIDANG PEMBANGUNAN: PEREKONOMIAN

PRIORITAS : Pemberdayaan Koperasi dan UMKM

NO	FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN /LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010 - 2014 (Rp. Miliar)
				2010	2014			
1.	FOKUS: Peningkatan iklim usaha yang kondusif bagi koperasi dan UMKM	a. Terwujudnya pemberdayaan koperasi dan UMKM yang lebih koordinatif dan partisipatif, yang didukung peningkatan peran lembaga-lembaga swasta dan masyarakat.	a1. Sistem koordinasi dan konsultasi pemerintah, swasta dan masyarakat dalam penyelerasan upaya-upaya pemberdayaan koperasi dan UMKM dilembagakan.					49,3
			a2. Jumlah program dan kegiatan pemberdayaan koperasi dan UMKM di berbagai instansi pemerintah pusat dan daerah yang telah diselenggarakan dan dikoordinasikan dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasinya.					
			a3. Jumlah program dan kegiatan pemberdayaan koperasi dan UMKM yang diselenggarakan lembaga-lembaga masyarakat secara mandiri dan/atau bekerja sama dengan pemerintah dan swasta.					
		b. Tersedianya regulasi/ kebijakan nasional dan daerah yang mendukung pemberdayaan koperasi dan UMKM.	Jumlah regulasi/kebijakan nasional dan daerah yang sudah diterbitkan/ disempurnakan untuk mendukung pemberdayaan koperasi dan UMKM.					

BIDANG PEMBANGUNAN: PEREKONOMIAN
PRIORITAS : Pemberdayaan Koperasi dan UMKM

NO	FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN /LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010 - 2014 (Rp. Miliar)
				2010	2014			
a.	Penataan peraturan perundang-undangan terkait perkoperasian, lembaga keuangan mikro (LKM), pendaftaran dan perijinan usaha, lokasi usaha, penggunaan produksi dalam negeri, dan penyebarluasan teknologi tepat guna, beserta ketentuan pelaksanaannya.	Peraturan perundang-undangan dan ketentuan pelaksanaan terkait koperasi, UMKM dan sistem pendukungnya yang diterbitkan/disempurnakan.	Jenis peraturan perundang-undangan yang terkait koperasi, UMKM dan sistem pendukungnya yang disepakati untuk disusun, diperbaiki, ditetapkan dan dijabarkan dalam ketentuan pelaksanaannya.	RUU Koperasi; Materi RUU LKM; RPP-UU No. 20/2008; PP-Pengganti PP 9/95; Perpres Lembaga Pengembangan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam (KSP)/ Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS); Perpres Lembaga APEX; Peraturan Teknis.	UU Koperasi; UU LKM; PP untuk UU No. 20/2008; PP-Pengganti PP 9/95; Perpres Lembaga Pengembangan dan Pengawasan KSP/ KJKS; Perpres Lembaga APEX; RPP-UU Koperasi; RPP-UU LKM; Peraturan Teknis.	Pemberdayaan Koperasi dan UMKM	Kemen. KUKM	39,5
b.	Peninjauan dan penghapusan berbagai pungutan dan regulasi yang merugikan koperasi dan UMKM, baik yang sektoral maupun spesifik daerah.	Terselenggaranya peninjauan pungutan yang merugikan koperasi dan UMKM, baik sektoral maupun spesifik daerah.	Laporan yang berisikan sejumlah rekomendasi penghapusan pungutan yang merugikan koperasi dan UMKM, baik sektoral maupun spesifik daerah.	40 Regulasi	200 Regulasi	Pemberdayaan Koperasi dan UMKM	Kemen. KUKM	7,5
c.	Pembentukan Forum Koordinasi Pemberdayaan Koperasi dan UMKM.	Berfungsinya Forum Koordinasi Pemberdayaan Koperasi dan UMKM.	Terbitnya landasan hukum.	Konsep struktur dan fungsi Forum Koordinasi Pemberdayaan Koperasi dan UMKM	Forum Koordinasi Pemberdayaan Koperasi dan UMKM.	Pemberdayaan Koperasi dan UMKM	Kemen. KUKM	2,3

BIDANG PEMBANGUNAN: PEREKONOMIAN
 PRIORITAS : Pemberdayaan Koperasi dan UMKM

NO	FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERI-AN /LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010 - 2014 (Rp. Miliar)
				2010	2014			
2.	FOKUS: Pengembangan produk dan pemasaran bagi koperasi dan UMKM.	Berkembangnya produk koperasi dan UMKM yang berkualitas, inovatif dan kreatif untuk bersaing di	a. Jumlah produk dan jasa koperasi dan UMKM yang terstandarisasi. b. Omzet tahunan koperasi dan UMKM. c. Nilai pemasaran produk dan jasa koperasi dan UMKM yang berbasis inovasi dan kreativitas di pasar domestik dan mancanegara. d. Nilai ekspor produk yang dihasilkan koperasi dan UMKM. e. Tujuan pemasaran produk dan jasa koperasi dan UMKM.					566,2
a.	Penyediaan sistem insentif dan pembinaan bagi UMKM yang berbasis inovasi dan berorientasi ekspor.	a. Tersedianya sistem insentif bagi UMKM yang berbasis inovasi dan berorientasi ekspor.	Jenis dan jangkauan sistem insentif bagi UMKM yang berbasis inovasi dan berorientasi ekspor.	Insentif dukungan pemasaran, subsidi bunga dan peningkatan kapasitas SDM di 5 propinsi.	Insentif dukungan pemasaran, subsidi bunga dan peningkatan kapasitas SDM di 25 propinsi. ^{ki)}	Pemberdayaan Koperasi dan UMKM	Kemen. KUKM	5,0
				-	Pelatihan 800 orang terkait manajemen ekspor, ISO, mutu. ^{ki)}	Pemberdayaan Koperasi dan UMKM	Kemen. KUKM	4,0
		b. Tersedianya KUKM potensial mengikuti pameran di luar negeri.	Pengembangan/pelebaran pasar ekspor produk KUKM melalui pameran di luar negeri.	140 KUKM	700 KUKM ^{ki)}	Pemberdayaan Koperasi dan UMKM	Kemen. KUKM	42,5
		c. Tersedianya KUKM dalam pengembangan desain produk.	Pengembangan daya saing pemasaran industri kreatif KUKM potensial/ ekspor.	160 KUKM	800 KUKM ^{ki)}	Pemberdayaan Koperasi dan UMKM	Kemen. KUKM	7,0
		d. Terwujudnya peningkatan kemampuan berinovasi UMKM dalam pengembangan desain produk UMKM dan pemasaran.	Peningkatan daya saing dan pemasaran produk kriya KUKM.	100 KUKM	500 KUKM ^{ki)}	Pemberdayaan Koperasi dan UMKM	Kemen. KUKM	5,0
		e. Meningkatnya akses pasar produk KUKM.	Meningkatnya daya saing dan identitas produk UMKM di bidang makanan dan minuman.	200 KUKM	1.000 KUKM ^{ki)}	Pemberdayaan Koperasi dan UMKM	Kemen. KUKM	7,0

BIDANG PEMBANGUNAN: PEREKONOMIAN
PRIORITAS : Pemberdayaan Koperasi dan UMKM

NO	FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN /LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010 - 2014 (Rp. Miliar)
				2010	2014			
		f. Berkembangnya komoditas unggulan daerah melalui pendekatan <i>One Village One Product</i> (OVOP) di beberapa propinsi.	Meningkatnya budidaya, pengolahan/industri, pemasaran dan sarana penunjang (modal, pendampingan, teknologi dll.).	4 lokasi	20 lokasi ^{ki}	Pemberdayaan Koperasi dan UMKM	Kemen. KUKM	10,0
b.	Pengembangan dan penguatan sentra-sentra produksi/ klaster usaha skala mikro dan kecil, terutama di daerah tertinggal dan terisolir	a. Meningkatkan peran koperasi dalam pengembangan dan pengelolaan pasar.	Pengembangan sarana pemasaran di daerah tertinggal/ perbatasan.	100 usaha mikro (UMi)	500 UMi ^{ki}	Pemberdayaan Koperasi dan UMKM	Kemen. KUKM	11,3
		b. Terfasilitasinya sarana usaha pedagang kaki lima (PKL) yang memiliki koperasi/ kelompok.	Tertatanya sarana usaha PKL dan terbangunnya sarana pemasaran produk KUMK.	150 UMi, 5 koperasi	2.150 UMi, 25 ^{ki} koperasi	Pemberdayaan Koperasi dan UMKM	Kemen. KUKM	34,2
		c. Meningkatkan kapasitas produksi sentra UMKM.	Bantuan sarana usaha produksi melalui koperasi.	60 koperasi	300 koperasi ^{ki}	Pemberdayaan Koperasi dan UMKM	Kemen. KUKM	175,0
		d. Tersedianya dukungan penguatan sentra-sentra produksi/ klaster usaha mikro dan kecil terutama di daerah tertinggal dan terisolir.	Jumlah usaha skala mikro dan kecil yang difasilitasi berupa bantuan usaha, pengenalan teknologi tepat guna, dan replikasi model teknologi tepat guna.	25 koperasi, 300 UMi, 180 UK	125 koperasi, ^{ki} 1.500 UMi, 900 UK	Pemberdayaan Koperasi dan UMKM	Kemen. KUKM	19,5
c.	Dukungan pengembangan kemitraan yang melibatkan koperasi dan UMKM dalam pengembangan produk-produk unggulan yang berbasis rantai nilai, subkontrak, alih teknologi, pemasaran/ ekspor, atau investasi	a. Terfasilitasinya pembentukan jaringan usaha melalui koperasi.	Pengembangan jaringan usaha melalui koperasi.	300 koperasi dan UMKM (KUMKM)	1.500 KUMKM ^{ki}	Pemberdayaan Koperasi dan UMKM	Kemen. KUKM	5,0
		b. Terfasilitasinya kemitraan pemasaran eko-produk KUMKM.	Pengembangan kemitraan eko-produk KUMKM	100 KUMKM	500 KUMKM ^{ki}	Pemberdayaan Koperasi dan UMKM	Kemen. KUKM	5,0
		c. Meningkatkan jumlah KUMKM yang bermitra di sektor pariwisata.	Kemitraan KUMKM di sektor pariwisata	300 KUMKM	1.500 KUMKM ^{ki}	Pemberdayaan Koperasi dan UMKM	Kemen. KUKM	6,4
		d. Terfasilitasinya kemitraan pola waralaba di kalangan KUMKM.	Kemitraan waralaba	100 KUMKM	500 KUMKM ^{ki}	Pemberdayaan Koperasi dan UMKM	Kemen. KUKM	3,0
		e. Terfasilitasinya kemitraan pemasaran produk energi biomassa KUMKM.	Kemitraan pemasaran produk energi biomassa	110 KUMKM	550 KUMKM ^{ki}	Pemberdayaan Koperasi dan UMKM	Kemen. KUKM	1,5
		f. Terfasilitasinya kemitraan KUMKM dengan BUMN.	Kemitraan KUMKM dengan BUMN	200 KUMKM	1.000 KUMKM ^{ki}	Pemberdayaan Koperasi dan UMKM	Kemen. KUKM	3,0
		g. Meningkatkan mutu dan desain kemasan produk KUKM.	Pengembangan kemasan produk KUKM	500 KUKM	2.500 KUMKM ^{ki}	Pemberdayaan Koperasi dan UMKM	Kemen. KUKM	11,3
		h. Terfasilitasinya kemitraan pola subkontrak di kalangan KUMKM.	Pengembangan kemitraan pola subkontrak	-	400 KUMKM ^{ki}	Pemberdayaan Koperasi dan UMKM	Kemen. KUKM	2,1

BIDANG PEMBANGUNAN: PEREKONOMIAN
PRIORITAS : Pemberdayaan Koperasi dan UMKM

NO	FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN /LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010 - 2014 (Rp. Miliar)
				2010	2014			
		i. Terwujudnya kemitraan yang saling menguntungkan antara koperasi dengan peritel modern.	Pengembangan jaringan dengan bisnis ritel modern (SME' sCo mart)	200 KUMKM	1.000 KUMKM ^{KJ}	Pemberdayaan Koperasi dan UMKM	Kemen. KUKM	10,0
		j. Tercapainya peningkatan produktivitas UMKM.	Peningkatan produktivitas usaha mikro melalui klinik bisnis	150 Umi	750 KUMKM ^{KJ}	Pemberdayaan Koperasi dan UMKM	Kemen. KUKM	13,8
d.	Dukungan pemasaran produk dan jasa koperasi dan UMKM melalui pengembangan dan penguatan kelembagaan, informasi pasar dan jaringan pemasaran baik domestik maupun ekspor.	a. Tersedianya <i>trading house</i> bagi KUMKM	Pengembangan <i>trading house</i> bagi KUMKM dalam rangka mengoptimalkan ekspansi pemasaran dan promosi produk KUMKM ke dalam maupun luar negeri, khususnya di Timur Tengah.	10 Unit	50 Unit ^{KJ}	Pemberdayaan Koperasi dan UMKM	Kemen. KUKM	5,0
		b. Terpromosinya KUKM yang memiliki produk berkualitas.	Penyelenggaraan Smesco Festival	500 KUKM	2.500 KUKM ^{KJ}	Pemberdayaan Koperasi dan UMKM	Kemen. KUKM	20,0
		c. Tersedianya dukungan pemasaran bagi usaha mikro.	Peningkatan akses produk usaha mikro melalui pasar rakyat	1.000 UMi	5.000 Umi ^{KJ}	Pemberdayaan Koperasi dan UMKM	Kemen. KUKM	27,5
		d. Terwujudnya pengelolaan manajemen pasar tradisional oleh koperasi.	Pengembangan pengelolaan manajemen pasar tradisional	-	4 paket ^{KJ}	Pemberdayaan Koperasi dan UMKM	Kemen. KUKM	1,2
		e. Pengembangan Pusat Promosi KUKM.	Pusat Promosi KUKM	5 lokasi	25 lokasi ^{KJ}	Pemberdayaan Koperasi dan UMKM	Kemen. KUKM	2,5
		f. Peningkatan fungsi dan kualitas sarana dan prasarana pasar tradisional.	Pengembangan pasar tradisional melalui koperasi	200 UMi	1.000 UMi ^{KJ}	Pemberdayaan Koperasi dan UMKM	Kemen. KUKM	20,0
		g. Tersebar informasi produk-produk KUMKM yang berkualitas.	Terselenggaranya pameran produk-produk KUMKM yang berkualitas	720 KUKM	3.600 KUMKM ^{KJ}	Pemberdayaan Koperasi dan UMKM	Kemen. KUKM	59,8
		h. Meningkatnya akses pasar produk KUMKM melalui penyediaan sarana prasarana pemasaran.	Penyediaan fasilitas sarana prasarana pemasaran produk KUMKM	255 KUKM	1.275 KUKM ^{KJ}	Pemberdayaan Koperasi dan UMKM	Kemen. KUKM	17,5
e.	Dukungan sistem insentif bagi penyedia jasa pendampingan dan konsultasi keuangan yang mendukung peningkatan akses koperasi dan UMKM kepada sumber-sumber pembiayaan.	Tersedianya jasa pendampingan dan konsultasi keuangan bagi koperasi dan UMKM.	Jumlah Konsultan Keuangan Mitra Bank (KKMB) yang ditingkatkan kapasitasnya.	200 orang KKMB	1.000 orang KKMB ^{KJ}	Pemberdayaan Koperasi dan UMKM	Kemen. KUKM	2,7
			Jumlah koperasi dan UMKM yang sudah memanfaatkan jasa pendampingan dan konsultasi keuangan, baik yang disediakan pemerintah, swasta maupun masyarakat.	-	2.000 koperasi, ^{KJ} 2.400 UMKM	Pemberdayaan Koperasi dan UMKM	Kemen. KUKM	4,0

BIDANG PEMBANGUNAN: PEREKONOMIAN
 PRIORITAS : Pemberdayaan Koperasi dan UMKM

NO	FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN /LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010 - 2014 (Rp. Miliar)
				2010	2014			
f.	Koordinasi Penataan Kelembagaan Pengembangan UKM berbasis inovasi	Meningkatnya kapasitas kewirausahaan UKM berbasis inovasi	Persentase rekomendasi hasil koordinasi kebijakan pengembangan UKM berbasis inovasi yang ditindaklanjuti.	70-75%	90-100%	Pogram Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian	Kemenko Perekonomian	24,7
3.	FOKUS: Peningkatan Daya Saing SDM Koperasi dan UMKM	a. Meningkatnya kapasitas dan produktivitas koperasi dan UMKM, yang didukung pengusaha, pengelola dan pekerja yang memiliki kewirausahaan dan kompetensi yang tinggi.	a. Tingkat produktivitas UMKM					196,9
			b. Tingkat kinerja koperasi					-
		b. Meningkatnya jumlah wirausaha baru yang didukung pola pengembangan kewirausahaan yang tersistem.	a. Jumlah wirausaha baru					-
			b. Sistem pengembangan kewirausahaan					-
a.	Penyusunan <i>blueprint</i> pengembangan kewirausahaan nasional yang didukung pembenahan pranata kelembagaan.	a. Tersusunnya <i>blueprint</i> pengembangan kewirausahaan nasional.	Dokumen <i>blueprint</i> pengembangan kewirausahaan nasional disusun.	Kajian <i>blueprint</i> pengembangan kewirausahaan nasional selesai.	Dokumen ^{K)} <i>blueprint</i> pengembangan kewirausahaan ditetapkan, dan pemasyarakatannya.	Pemberdayaan Koperasi dan UMKM	Kemen. KUKM	4,0
		b. Diperbaikinya pranata kelembagaan pengembangan kewirausahaan, terutama dalam aspek regulasi dan kurikulum pendidikan dan pelatihan kewirausahaan sesuai dengan <i>blueprint</i> pengembangan kewirausahaan.	a. Regulasi dan pranata kelembagaan pengembangan kewirausahaan nasional yang diselaraskan dengan dokumen <i>blueprint</i> .	-	Gerakan ^{K)} Kewirausahaan Nasional dan kelembagaan pendukung.	Pemberdayaan Koperasi dan UMKM	Kemen. KUKM	3,0

BIDANG PEMBANGUNAN: PEREKONOMIAN
 PRIORITAS : Pemberdayaan Koperasi dan UMKM

NO	FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERI-AN /LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010 - 2014 (Rp. Miliar)
				2010	2014			
			b. Kurikulum dan modul pendidikan dan pelatihan kewirausahaan khususnya untuk pengusaha skala mikro, kecil dan menengah, serta pengelola koperasi diperbaiki dan diterapkan.	-	Kurikulum dan modul diklat kewirausahaan bagi pengusaha skala mikro, kecil dan menengah, serta pengelola koperasi diterapkan. ^{K)}	Pemberdayaan Koperasi dan UMKM	Kemen. KUKM	5,0
b.	Dukungan pengembangan wirausaha baru melalui inkubator teknologi dan bisnis, serta pola-pola pengembangan lainnya sesuai <i>blueprint</i> pengembangan kewirausahaan.	a. Tersedianya dukungan pengembangan wirausaha baru melalui inkubator teknologi dan bisnis.	a. Jumlah wirausaha baru yang dikembangkan/difasilitasi melalui pola pengembangan wirausaha lainnya.	-	800 orang ^{K)}	Pemberdayaan Koperasi dan UMKM	Kemen. KUKM	16,0
			b. Jumlah tempat pendidikan keterampilan usaha (TPKU) yang dibangun.	200 unit	1.000 unit ^{K)}	Pemberdayaan Koperasi dan UMKM	Kemen. KUKM	100,0
			c. Jumlah calon wirausaha baru.	1.000 orang	5.000 orang ^{K)}	Pemberdayaan Koperasi dan UMKM	Kemen. KUKM	5,0
		b. Terfasilitasi wirausaha baru melalui pendampingan.	a. Kinerja kapasitas dan produktivitas koperasi dan wirausaha baru meningkat.	350 koperasi dan usaha mikro dan kecil (KUMK)	1.750 KUMK ^{K)}	Pemberdayaan Koperasi dan UMKM	Kemen. KUKM	21,5
		c. Meningkatnya kemampuan usaha UKM melalui inkubator	b. Jumlah UKM <i>tenant</i> binaan inkubator yang difasilitasi.	10 inkubator	10 inkubator ^{K)}	Pemberdayaan Koperasi dan UMKM	Kemen. KUKM	2,5

BIDANG PEMBANGUNAN: PEREKONOMIAN
 PRIORITAS : Pemberdayaan Koperasi dan UMKM

NO	FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN /LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010 - 2014 (Rp. Miliar)
				2010	2014			
c.	Peningkatan kompetensi pengusaha skala mikro, kecil dan menengah serta pengelola koperasi.	Meningkatnya kompetensi pengusaha skala mikro, kecil dan menengah serta pengelola koperasi.	a. Sistem standarisasi dan sertifikasi kompetensi sumber daya manusia (SDM) koperasi dan UMKM.	-	Sistem standarisasi dan sertifikasi kompetensi SDM koperasi dan UMKM dan pemasarakan nya. ^{K)}	Pemberdayaan Koperasi dan UMKM	Kemen. KUKM	4,0
			b. Jumlah pengusaha skala mikro, kecil dan menengah serta pengelola koperasi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (diklat) keterampilan teknis dan manajerial.	450 pengusaha skala mikro, kecil dan menengah serta pengelola koperasi.	2.250 pengusaha skala mikro, kecil dan menengah serta pengelola koperasi. ^{K)}	Pemberdayaan Koperasi dan UMKM	Kemen. KUKM	2,5
			c. Jumlah modul diklat dan pendidikan <i>vocational</i>	5 modul	25 modul ^{K)}	Pemberdayaan Koperasi dan UMKM	Kemen. KUKM	2,5
			d. Jumlah peserta yg mengikuti diklat <i>vocational</i>	1.000 orang	5.000 orang ^{K)}	Pemberdayaan Koperasi dan UMKM	Kemen. KUKM	25,0
d.	Revitalisasi dan pengembangan lembaga pendidikan dan pelatihan koperasi dan UMKM.	Terlaksananya revitalisasi dan pengembangan lembaga pendidikan dan pelatihan koperasi dan UMKM.	a. Pedoman revitalisasi lembaga diklat KUMKM	-	Pedoman standarisasi diklat KUMKM. ^{K)}	Pemberdayaan Koperasi dan UMKM	Kemen. KUKM	2,9
			b. Jumlah tenaga pengelola dan instruktur pada lembaga diklat yang dilatih.	120 orang	600 orang ^{K)}	Pemberdayaan Koperasi dan UMKM	Kemen. KUKM	3,0
4.	FOKUS: Penguatan Kelembagaan Koperasi	a. Berkembangnya praktek berkoperasi yang sesuai prinsip dan asas koperasi.	Jumlah koperasi aktif dan jumlah koperasi aktif yang melaksanakan rapat anggota tahunan (RAT).					70,0

BIDANG PEMBANGUNAN: PEREKONOMIAN
 PRIORITAS : Pemberdayaan Koperasi dan UMKM

NO	FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERI-AN /LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010 - 2014 (Rp. Miliar)
				2010	2014			
		b. Meningkatnya peran koperasi dalam memfasilitasi perkembangan usaha anggota dan peningkatan kesejahteraan anggota.	a. Jumlah koperasi yang beranggotakan/ didirikan kelompok usaha mikro, kecil dan menengah.					-
			b. Jumlah koperasi yang sudah memiliki jaringan usaha sesuai kegiatan ekonomi produktif anggotanya.					-
			c. Jumlah koperasi yang sudah memiliki kapasitas sebagai lembaga penyedia jasa pengembangan usaha bagi anggotanya.					-
a.	Penyuluhan perkoperasian kepada masyarakat luas yang disertai dengan pemasyarakatan contoh-contoh koperasi sukses yang dikelola sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip koperasi yang baik.	Terselenggaranya penyuluhan perkoperasian yang menjangkau masyarakat luas dan disertai dengan contoh terbaik praktik berkoperasi.	a. Landasan hukum bagi penyelenggaraan penyuluhan perkoperasian.	Konsep landasan hukum tentang jabatan fungsional penyuluh perkoperasian	Landasan hukum tentang jabatan fungsional penyuluh perkoperasian ^{ki}	Pemberdayaan Koperasi dan UMKM	Kemen. KUKM	2,0
			b. Materi dan media penyuluhan	1 paket	5 paket ^{ki}	Pemberdayaan Koperasi dan UMKM	Kemen. KUKM	5,0
			c. Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam penyuluhan perkoperasian.	120 orang di 4 propinsi	600 orang di 20 propinsi ^{ki}	Pemberdayaan Koperasi dan UMKM	Kemen. KUKM	2,9
			d. Jumlah jabatan fungsional penyuluh koperasi	-	2.400 orang ^{ki}	Pemberdayaan Koperasi dan UMKM	Kemen. KUKM	4,0
			e. Jumlah peserta pembinaan dan pengembangan SDM koperasi.	-	2.400 orang ^{ki}	Pemberdayaan Koperasi dan UMKM	Kemen. KUKM	2,0
b.	Peningkatan kualitas administrasi dan pengawasan pemberian badan hukum koperasi.	Kualitas administrasi dan pengawasan pemberian badan hukum koperasi semakin meningkat.	Efisiensi proses administrasi pemberian badan hukum koperasi.	30 % koperasi sudah tertata administrasi badan hukumnya	70 % koperasi sudah tertata administrasi badan hukumnya	Pemberdayaan Koperasi dan UMKM	Kemen. KUKM	5,5

BIDANG PEMBANGUNAN: PEREKONOMIAN
 PRIORITAS : Pemberdayaan Koperasi dan UMKM

NO	FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN /LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010 - 2014 (Rp. Miliar)
				2010	2014			
c.	Penyediaan insentif dan fasilitasi dalam rangka pengembangan usaha dan jaringan kerja sama usaha antar koperasi, termasuk pengembangan koperasi sekunder.	Tersedianya fasilitasi bagi pengembangan jaringan kerja sama usaha antar koperasi.	Jangkauan fasilitasi bagi pengembangan kerja sama usaha antar koperasi.	5 model kerja sama antara koperasi sekunder dengan anggotanya; 5 fasilitasi pengembangan usaha koperasi	25 model kerja sama antara koperasi sekunder dengan anggotanya; 25 fasilitasi pengembangan usaha koperasi	Pemberdayaan Koperasi dan UMKM	Kemen. KUKM	3,7
d.	Peningkatan kapasitas kelembagaan koperasi.	Meningkatnya kapasitas dan kinerja kelembagaan koperasi.	a. Jumlah koperasi dan peserta bimbingan teknis perkoperasian.	5 kebijakan dan 200 KUMKM	25 kebijakan dan 1.000 KUMKM	Pemberdayaan Koperasi dan UMKM	Kemen. KUKM	25,0
			b. Jumlah pengembangan organisasi kantor cabang koperasi simpan pinjam (KSP)/ unit simpan pinjam (USP).	15 kantor cabang	75 kantor cabang	Pemberdayaan Koperasi dan UMKM	Kemen. KUKM	1,3
			c. Jumlah koperasi yang menerapkan prinsip akuntabilitas dan pengendalian koperasi.	1.500 koperasi	7.500 koperasi	Pemberdayaan Koperasi dan UMKM	Kemen. KUKM	3,5
			d. Jumlah koperasi yang diperingkat.	1.000 koperasi, 75 koperasi berprestasi	5.000 koperasi, 375 koperasi berprestasi	Pemberdayaan Koperasi dan UMKM	Kemen. KUKM	10,4
e.	Peningkatan kemampuan pembina koperasi.	Meningkatnya kemampuan pembina koperasi.	a. Materi kurikulum dan diklat pembina koperasi.	Penyempurnaan kurikulum diklat pembina koperasi.	Kurikulum diklat pembina koperasi dan penerapannya.	Pemberdayaan Koperasi dan UMKM	Kemen. KUKM	2,9
			b. Jumlah pembina koperasi yang mengikuti diklat.	-	2.400 orang	Pemberdayaan Koperasi dan UMKM	Kemen. KUKM	2,0
TOTAL								882,4

KETERANGAN :
^{Kj} Angka Kumulatif 5 tahun (2010-2014)

RENCANA TINDAK PRIORITAS BIDANG PEREKONOMIAN

BIDANG PEMBANGUNAN: PEREKONOMIAN

PRIORITAS : Jaminan Sosial

NO	FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010 - 2014 (Rp. Miliar)
				2010	2014			
1.	FOKUS: Penataan Kelembagaan Jaminan Sosial	Peningkatan kualitas hidup masyarakat Indonesia	Angka kemiskinan, angka HDI			1. Program Koordinasi Pengembangan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat 2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Kemenko Kesra, Kemenkes, Kemenakertrans, Kemenkeu, Bappenas, Kemdagri, Kemenhan, MenPAN	892,5
a.	Penataan Kelembagaan Jaminan Sosial Nasional	1. Tersedianya NIK bagi setiap peserta jaminan sosial	NIK sudah terlaksana bagi seluruh masyarakat.	30%	100% ^{k)}	Program Pengembangan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Kemenko Kesra/Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), Kemdagri	50,1
		2. Tersusunnya perangkat hukum SJSN:	1. UU BPJS	100%	100%		Kemenko Kesra/DJSN, Kemenkes, Kemenakertrans, Kemenhan, KEMEN PAN dan RB, Kemenkeu	
			2. PP PBI					
			3. PP Jaminan Kesehatan					
			4. PP Kepesertaan					
			PP Pensiun; Jaminan Kecelakaan Kerja; Jaminan Hari Tua; dan Jaminan Kematian	80%	100%		Kemenko Kesra/DJSN, Kemenkeu	
			PP Tata Pengelolaan dan Pengembangan Dana Jaminan Sosial	30%	100%		Kemenko Kesra/DJSN, Kemenkeu	
		3. Tersusunnya berbagai studi dan kajian di bidang jaminan sosial untuk memperkuat pelaksanaan SJSN.	Unit Permodelan Keuangan SJSN	100%	100%		Kemenko Kesra/DJSN, Kemenkeu	
			Studi Lansia, Pensiun, Jamkesmas, Pekerja Informal		100%		Kemenko Kesra/DJSN, Bappenas	

BIDANG PEMBANGUNAN: PEREKONOMIAN

PRIORITAS : Jaminan Sosial

NO	FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010 - 2014 (Rp. Miliar)
				2010	2014			
			Studi Keterkaitan Pembiayaan SJSN dengan Aturan Perdagangan, Ketenagakerjaan, Perpajakan dan Investasi.		100%		Kemenko Kesra/DJSN, Kemenkeu	
		4. Terharmonisasinya regulasi di bidang jaminan sosial;	Harmonisasi dengan UU Dana Pensiun		100%		Kemenko Kesra/DJSN, Kemenkeu	
			Harmonisasi dengan UU Jamsostek		100%		Kemenko Kesra/DJSN, Kemenakertrans	
		5. Terselenggaranya jaminan sosial berbasis asuransi bagi seluruh pekerja formal maupun informal dengan prioritas utama asuransi kesehatan; dan terciptanya sistem, prosedur, serta struktur organisasi penyelenggara jaminan sosial yang efisien dan efektif	1. Rencana Transisi BPJS 2. Rencana detail organisasi dan anggaran pengendali BPJS 3. Memulai pendaftaran pemberi kerja dan pekerja 4. Rencana Pendataan dan Jumlah Kontribusi 5. Merancang sosialisasi pada masyarakat 6. Membangun strategi pengembangan fasilitas kesehatan 7. Negosiasi dengan penyedia layanan kesehatan dan menyusun skema monitoringnya Implementasi model manajemen tabungan hari tua pada BPJS	100%	100%		Kemenko Kesra/DJSN, Kemenkeu, Kemenkes	
		6. Meningkatnya jangkauan/cakupan jaminan sosial terhadap pekerja miskin (yang tidak mampu memberikan kontribusi iuran);	Jumlah peserta jaminan sosial dari masyarakat miskin				Kemenko Kesra/DJSN, Kemenakertrans	
		7. Meningkatnya kualitas manfaat jaminan sosial bagi pekerja;	Kualitas manfaat jaminan sosial.				Kemenko Kesra/DJSN, Kemenakertrans	
b.	Pembinaan, Pengembangan Pembiayaan dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan	Terumuskannya kebijakan pembiayaan dan jaminan kesehatan	Persentase penduduk (termasuk seluruh penduduk miskin) yang memiliki jaminan kesehatan	59%	100%	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Kemenkes	842,4
TOTAL								892,5

KETERANGAN :

^{K)} Angka Kumulatif 5 tahun (2010-2014)



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2010
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH NASIONAL
(RPJMN)
TAHUN 2010--2014**

**BUKU II
MEMPERKUAT SINERGI ANTARBIDANG PEMBANGUNAN**

**BAB IV
ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI**

**Diperbanyak Oleh:
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS)
2010**



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
BAB IV ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	II.4-1
4.1 Kondisi Umum	II.4-1
4.2 Permasalahan dan Sasaran Pembangunan.....	II.4-7
4.2.1 Permasalahan Umum.....	II.4-7
4.2.1.1 Permasalahan di Sisi Litbang Penyedia Solusi Teknologi..	II.4-7
4.2.1.2 Permasalahan di Sisi Pengguna Teknologi.....	II.4-11
4.2.1.3 Permasalahan Integrasi pada Sisi Penyedia dan Pengguna Teknologi	II.4-12
4.2.2 Sasaran Pembangunan.....	II.4-12
4.3 Arah Kebijakan Pembangunan.....	II.4-13
4.3.1 Arah Pembangunan Iptek Menurut RPJPN 2005-2025	II.4-13
4.3.2 Arah Pembangunan Iptek 2010-2014	II.4-14
4.3.3 Strategi Pembangunan Iptek.....	II.4-15



BAB IV

ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI

Pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) diarahkan pada peningkatan kualitas penguasaan dan pemanfaatan iptek dalam rangka mendukung transformasi perekonomian nasional menuju perekonomian yang berbasis pada keunggulan kompetitif. Dalam mewujudkan arahan ini, pembangunan iptek menghadapi berbagai permasalahan baik yang bersumber dari sisi litbang sebagai penyedia solusi teknologi, sisi pengguna teknologi, maupun yang berkaitan dengan integrasi sisi penyedia dan sisi pengguna teknologi. Berdasarkan permasalahan tersebut, secara garis besar pembangunan iptek dirancang dalam dua bagian, yaitu (1) yang berkaitan dengan wahana pembangunan iptek dan (2) yang berkaitan dengan substansi iptek itu sendiri. Agar dukungan iptek terhadap pembangunan nasional dapat berlangsung secara konsisten dan berkelanjutan, sistem inovasi nasional sebagai wahana pembangunan iptek akan diperkuat melalui penguatan kelembagaan, sumberdaya, dan jaringan iptek. Sementara itu, pembangunan substansi dilaksanakan melalui penelitian, pengembangan, dan penerapan iptek di bidang-bidang iptek yang strategis dan diarahkan untuk mencapai hasil yang semakin nyata mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional baik dalam bentuk publikasi ilmiah, paten, prototip, layanan teknologi, maupun wirausahawan teknologi.

4.1 Kondisi Umum

Peranan Iptek menjadi perhatian utama di negara-negara maju dalam menjawab permasalahan pembangunan bangsa dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Di berbagai negara maju, kebijakan ekonomi dan kebijakan iptek semakin terintegrasi dan diselaraskan untuk meningkatkan daya saing nasional. Pembangunan bidang Iptek hingga kini telah memberikan landasan bagi terwujudnya sistem inovasi nasional (SIN) dalam rangka membangun perekonomian negara yang berdaya saing. Kondisi umum iptek, yang diantaranya mencakup potret SDM iptek, jumlah publikasi ilmiah, indeks kutipan ilmiah (*citation index*), jumlah paten, dan sumber pendanaan kegiatan penelitian dan pengembangan ditunjukkan dalam uraian berikut ini.

Potret SDM iptek ditunjukkan melalui persentase sumber daya manusia iptek dalam jenjang S3 di Lembaga Litbang Pemerintah Non Departemen (LPND) dan Lembaga Litbang Departemen (LPD) dari tahun 2005 - 2008 yang rata-rata hanya 4,48 %, sedangkan untuk jenjang S2 sebesar 14,99 %. Dalam kurun waktu yang sama, SDM yang menempuh jenjang karier melalui jabatan fungsional rata-rata 37,4 %. Dilihat dari proporsi jumlah peneliti yang dimiliki Lembaga Litbang Non Departemen dan Lembaga Litbang Departemen terhadap jumlah total peneliti, diketahui bahwa jumlah peneliti

terbesar berasal dari Departemen Pertanian, disusul LIPI, BPPT, BATAN, dan Departemen ESDM.

Selain berada di LPND dan LPD, SDM Iptek juga berada perguruan tinggi. Survei litbang di perguruan tinggi yang dilakukan LIPI pada tahun 2007 menunjukkan bahwa total tenaga kerja (dosen) yang ada di perguruan tinggi negeri (PTN) berjumlah 24.260 orang, dengan uraian yang bekerja di fakultas sebanyak 7.731 orang, di lembaga penelitian sebanyak 8.820 orang, di lembaga pengabdian masyarakat (LPM) sebanyak 6.979 orang, dan di politeknik sebanyak 730 orang.

Salah satu keluaran dari kegiatan penelitian adalah publikasi di jurnal ilmiah. Data dari *Essential Science Indicator* yang diterbitkan oleh *Institute for Scientific Information (ISI)* yang diolah Papiptek LIPI tahun 2007, selama periode tahun 2000 - 2004 jumlah publikasi internasional yang penulisnya orang Indonesia mencapai 2.193 judul. Angka ini masih rendah bila dibandingkan dengan Malaysia yang sebesar 5.810 judul, Thailand 10.024 judul, Singapura 25.046 judul, Korea Selatan 100.149 judul, dan China 234.831 judul. Dengan demikian, diperlukan upaya yang sistematis untuk dapat meningkatkan kegiatan penelitian yang hasilnya layak dimuat di jurnal-jurnal internasional. Dari 2.193 publikasi tersebut, yang paling banyak adalah di bidang keilmuan botani dan zoology (*plant and animal science*) sebanyak 381 judul, *clinical medicine* 371 judul, *environment / ecology* 218 judul, *geosciences* 186 judul, *agricultural science* 115 judul, *chemistry* 153 judul, *engineering* 132 judul, *physics* 130 judul, *social science, general* 101 judul, dan sisanya tersebar di bidang-bidang *biology & biochemistry, microbiology, economic and business, material science, immunology, pharmacology & toxicology, molecular biology & genetics, space science, dan multidisciplinary*. Data ini menunjukkan bahwa SDM penelitian yang memiliki kompetensi internasional masih didominasi peneliti di bidang ilmu hayati.

TABEL 4.1
PERSANDINGAN INDEKS KUTIPAN PUBLIKASI INTERNASIONAL

Bidang Ilmu	Cina	Korea Selatan	Singapura	Thailand	Malaysia	Indonesia
<i>Plant & animal science</i>	2,80	3,88	4,59	3,93	3,38	3,66
<i>Clinical medicine</i>	4,97	5,35	5,88	7,07	4,76	4,25
<i>Geosciences</i>	3,73	3,71	2,86	3,47	3,46	6,62
<i>Agricultural</i>	2,70	2,89	6,65	2,82	3,07	4,49



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Bidang Ilmu	Cina	Korea Selatan	Singapura	Thailand	Malaysia	Indonesia
<i>sciences</i>						
<i>Chemistry</i>	3,10	4,56	6,10	3,02	3,46	4,45
<i>Engineering</i>	1,83	2,06	2,29	1,65	1,13	2,25
<i>Physics</i>	3,21	4,57	3,20	1,79	2,46	3,72
<i>Microbiology</i>	6,21	4,54	9,92	9,18	6,53	8,79
<i>Material science</i>	2,13	3,12	3,21	1,80	1,96	2,07
<i>Immunology</i>	5,67	7,39	9,58	12,96	7,79	14,58

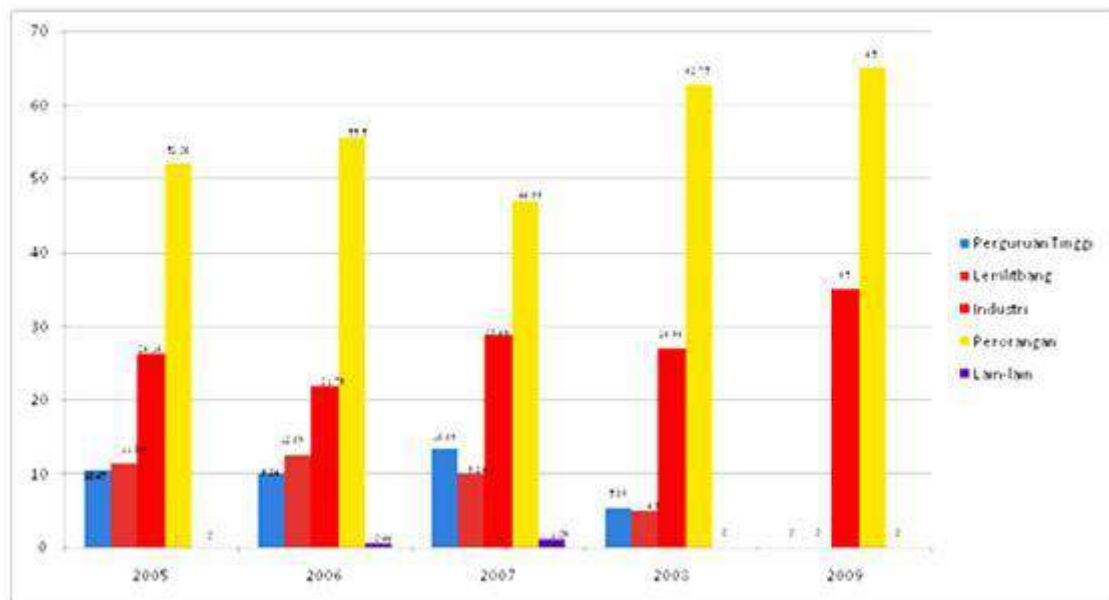
Sumber: Indikator Iptek Indonesia tahun 2006, LIPI

Sementara itu, dengan menggunakan basis data yang sama dari ISI di atas, telah diolah indeks kutipan per satu judul publikasi (*citation index*). Indeks kutipan satu publikasi menunjukkan berapa publikasi lain yang mengutip hasil penelitian dalam publikasi tersebut. Semakin banyak yang mengutip menunjukkan semakin diakui hasilnya yang artinya kualitas publikasi tersebut semakin tinggi. Indeks Kutipan publikasi oleh peneliti Indonesia dan dibandingkan dengan peneliti dari negara-negara Cina, Korea Selatan, Singapura, Thailand, dan Malaysia disajikan dalam Tabel 4.1. Di antara negara-negara ini, secara rata-rata Indonesia memiliki indeks yang lebih tinggi bila dibandingkan dengan Cina, Malaysia, dan Thailand, bahkan untuk bidang *immunology* dan *geosciences*, Indonesia menempati posisi yang paling tinggi. Di bidang perikanan, Indonesia hanya lebih rendah dari Singapura. Data ini menunjukkan bahwa walaupun jumlah publikasi dari Indonesia kalah banyak dengan negara-negara ini, kualitas ilmiahnya termasuk yang terbaik. Hal ini juga menunjukkan bahwa secara individu, peneliti Indonesia tidak kalah dengan negara-negara lain, bahkan termasuk yang berpotensi untuk menjadi yang terbaik.

Selain makalah ilmiah, bentuk lain dari hak kekayaan intelektual adalah paten. Dalam hal pengelolaan kekayaan intelektual, sentra hak kekayaan intelektual (HaKI) telah dibentuk oleh perguruan tinggi dan lembaga litbang. Sejak tahun 1998 sampai 2008, terdapat 65 sentra HaKI di Indonesia. Dari segi jumlah paten, berdasarkan data WIPO (*World Intellectual and Property Organization*), diketahui bahwa jumlah paten Indonesia yang terdaftar masih berada pada posisi kelima dari enam negara ASEAN (Singapura, Thailand, Malaysia, Filipina dan Vietnam), sedangkan berdasarkan data dari Ditjen HaKI tahun 1993-2008, jumlah paten yang diusulkan oleh orang Indonesia di

dalam negeri, tergolong masih rendah, seperti ditunjukkan pada Gambar 4.1. Data ini juga menunjukkan bahwa industri dan perorangan mendominasi pendaftaran paten. Perguruan Tinggi dan lembaga riset yang selama ini mendapatkan dana riset dari pemerintah justru paling sedikit mendaftarkan paten.

GAMBAR 4.1
JUMLAH PATEN YANG DIDAFTARKAN DI DIREKTORAT JENDERAL HKI



Sumber : Direktorat Teknologi Informasi, Dirjen HKI (2009) diolah oleh Tim (2009)

Hubungan antara sisi litbang dengan sisi pengguna teknologi dapat dilihat dari sumber pendanaan bagi lembaga litbang. Tabel 4.2 menyajikan gambaran secara umum sumber pendanaan litbang pada tahun 2006, yaitu melalui daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA), kerjasama dengan pihak swasta yang tercantum dalam dokumen DIKS, instansi pemerintah, swasta nirlaba (nonprofit), luar negeri, dan sumber pendanaan lain. Lembaga litbang pemerintah yang disurvei mencakup LPND, LPD, dan badan litbang daerah (Balitbangda). Secara umum data tersebut menunjukkan bahwa lebih dari 90% dana lembaga penelitian berasal dari dana sendiri (DIPA), dan hanya sekitar 4% berasal dari swasta, 4% berasal dari instansi pemerintah, dan yang berasal dari luar negeri cukup besar yaitu di atas 6%.

TABEL 4.2
SUMBER PENDANAAN LITBANG
TAHUN 2006
(MILYAR RUPIAH)

Lembaga	DIPA	Swasta DIKS	Instansi Pemerintah	Swasta Non Profit	Luar Negeri	Dana Lain	Total
LPND	308,3	13,0	13,6	0,5	38,4	1,6	375,3
LPD	835,1	48,5	6,5	1,6	22,4	4,3	918,3
BALITBANGDA	20,1	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	20,9

Sumber: Survei Litbang Lembaga Pemerintah tahun 2006, Kemeneg Ristek RI - 2007

Pembangunan bidang iptek juga telah menghasilkan pencapaian yang cukup membanggakan. Hasil-hasil kemajuan ini disusun sesuai dengan 6 prioritas bidang penelitian dalam Agenda Riset Nasional yaitu bidang: (1) ketahanan pangan, (2) energi baru dan terbarukan, (3) teknologi dan manajemen transportasi, (4) teknologi informasi dan komunikasi, (5) teknologi pertahanan dan keamanan, serta (6) teknologi kesehatan dan obat-obatan.

Hasil-hasil yang dicapai untuk kurun waktu 2005 hingga 2008 adalah sebagai berikut. Untuk mendukung ketahanan pangan, telah berhasil dikembangkan dan dilepas beberapa varietas unggul padi hibrida, varietas unggul jagung dan kedelai. Untuk mendukung diversifikasi pangan, telah dikumpulkan cadangan plasma nutfah untuk talas, ubi kayu, dan telah dikembangkan bibit unggul hasil rekayasa genetika pisang, kedelai, kacang hijau, manggis, nenas, dan pepaya. Telah dikembangkan juga teknik-teknik pemuliaan ternak untuk mendapatkan varietas sapi unggul. Di samping itu, telah berhasil dikembangkan vaksin untuk ternak untuk mencegah penyakit cacing hati, serta kit *Radioimmunoassay (RIA)* untuk inseminasi buatan, dan berbagai suplemen pakan multinutrisi.

Dalam rangka menciptakan energi baru dan terbarukan, telah diujicoba pemakaian minyak kelapa sawit pada mesin diesel genset, pemakaian minyak nabati pada kompor, pemakaian minyak nabati pengganti minyak solar pada mobil, dan campuran minyak nabati *Pure Plant Oil* pada beberapa kendaraan dalam bentuk kegiatan *Road Show* Manado – Jakarta. Di samping itu telah dikembangkan pemanfaatan *fuel grade ethanol* sebagai bahan bakar di sektor transportasi, dan saat ini telah dilakukan sertifikasi produk-produk *Fuel Grade Ethanol (FGE)* serta Gasohol E-10 dan Gasohol E-20. Selanjutnya, telah dikembangkan pula teknologi pengolahan minyak

nabati berbasis biji jarak untuk substitusi BBM termasuk alat press biji jarak yang mudah diterapkan.

Di bidang transportasi, telah dikembangkan teknologi *Boogie* kereta duorail dan monorail pada kecepatan medium dan tinggi; teknologi persinyalan dan sistem peringatan otomatis penutup pintu perlintasan kereta api; *Rail Fastening* untuk memperkuat dukungan rel pada bantalan kayu. Juga telah berhasil dikembangkan kapal bersayap dengan efek permukaan (*Wing in Surface Effect Ship – WISE*).

Di bidang teknologi informasi dan komunikasi telah berhasil dikembangkan aplikasi IGOS (*Indonesia Go Open Source*) yang siap dimanfaatkan untuk kebutuhan administrasi. Saat ini aplikasi berbasis *open source* tengah dikembangkan untuk keperluan-keperluan penelitian, seperti pengolah sintesis DNA, dan simulasi protein. Selain itu, telah berhasil dikembangkan rangkaian penerima '*Chip Wimax*', suatu sistem komunikasi generasi modern dengan frekuensi 2.3 GHz dan 3.3 GHz, serta sistem technical assistance pengembangan *E-Government*, paket aplikasi SIMDA.

Di bidang teknologi pertahanan dan keamanan, telah berhasil dikembangkan panser 6x6 yang dapat mengangkut sampai 13 personil tempur dan panser 4x4 untuk mengangkut 12 personil; disain dan contoh awal senjata berpeluru karet kaliber khusus spesifik POLRI; amunisi gas air mata kaliber 38 mm dan granat gas air mata untuk pengendalian kerusuhan massa; alat komunikasi yang dinamakan *tactical radio communications Hf-90 transceivers* dan *tactical radio communications Vhf-90 in transceivers*; radio jammer untuk mengganggu sistem komunikasi musuh dan sekaligus dapat digunakan untuk mengetahui posisi (lokasi) musuh; transponder sasaran torpedo latihan yang dapat mendeteksi dan menelusuri kapal selam di sekitar kapal atas air; pesawat udara tanpa awak (PUNA); *blast effect bomb (BEB)* yang merupakan bom latihan yang memberikan efek suara ledakan keras, seperti bom tajam.

Di bidang peroketan dan keantariksaan hingga tahun 2007 telah berhasil dikembangkan dan diluncurkan roket dengan diameter 320 mm dengan nama RX-320; lanjutan pengembangan roket balistik dan roket kendali berukuran kecil – sedang dengan bobot sampai dengan 243 Kg berdaya jangkauan s.d. 51 Km; serta telah dikembangkan produksi bahan bakar roket amonium perklorat (AP); *propelan double base* untuk substitusi propelan yang sudah kadaluarsa, misal untuk roket FFAR. Di samping itu, juga berhasil dikembangkan satelit mikro untuk penginderaan jauh melalui kerjasama dengan Jerman.

Di bidang kesehatan dan obat-obatan, telah dikuasai perangkat teknologi nuklir untuk penanggulangan penyakit kanker dan infeksi bakteri; telah dikembangkan protein human EPO yang saat ini akan memasuki uji klinis; *interferon I-2a* yang sering digunakan sebagai antiviral dan antikanker; produk herbal menjadi bahan baku obat kardiovaskuler, hepatitis, diabetes, anti trombosit, antimalaria (*artemisinin* dan analognya), antioksidan, antikanker, anti kolesterol, dan anti tuberkulosis. Di samping itu, Indonesia telah memiliki kemampuan untuk mengembangkan Vaksin Flu Burung



sendiri. Di samping ke enam fokus area di atas, dilakukan pula kegiatan-kegiatan penelitian di bidang ilmu-ilmu sosial.

Melihat kondisi itu, perlu dilakukan reorientasi pembangunan iptek ke depan dengan lebih memperhatikan dan mengarahkan aktivitas iptek ke kebutuhan nyata. Pembangunan iptek tidak bisa dilakukan lagi secara parsial tetapi harus terintegrasi dalam satu sistem pembangunan ekonomi bangsa. Selama ini topik riset lebih banyak untuk memenuhi rasa keingintahuan peneliti bukan didasari kebutuhan pasar.

4.2 Permasalahan dan Sasaran Pembangunan

4.2.1 Permasalahan Umum

Indeks daya saing Indonesia menurut *global competitiveness index (GCI)* yang dimuat dalam *The Global Competiveness Report 2008--2009* yang diterbitkan oleh *World Economic Forum* pada tahun 2008, menunjukkan bahwa Indonesia menempati peringkat 55 dari 134 negara. Salah satu dari 12 pilar daya saing yang diukur oleh badan ini adalah daya inovasi suatu bangsa, yang menempatkan Indonesia pada urutan ke 47. Menurut laporan itu, daya inovasi Indonesia terkendala oleh: kapasitas inovasi nasional yang masih rendah (menempati peringkat ke 53); kolaborasi antara universitas, litbang, dan industri yang masih perlu dibangun (peringkat ke 54); dan penggunaan paten sebagai alat perlindungan hak cipta penemu dan sekaligus alat untuk diseminasi teknologi yang perlu dibangun lebih baik (peringkat ke 84). Kendala lain yang penting adalah dukungan pemerintah dalam bentuk pembelian teknologi canggih hasil litbang dalam negeri (*government procurement of advanced technology product*) yang masih rendah, yaitu hanya menempati peringkat ke-87.

Fakta tersebut di atas menunjukkan bahwa peningkatan daya inovasi nasional melalui penguatan sistem inovasi nasional memerlukan pembangunan secara menyeluruh dan sistematis. Secara umum masalah mendasar yang dihadapi meliputi: (1) kemampuan sisi litbang menyediakan solusi-solusi teknologi; (2) kemampuan sisi pengguna dalam menyerap teknologi baru yang tersedia; serta (3) transaksi antara sisi litbang sebagai penyedia solusi teknologi dengan sisi pengguna belum terbangun dengan baik. Dengan kata lain, belum integrasi iptek di antara penyedia dan pengguna.

4.2.1.1 Permasalahan di Sisi Litbang Penyedia Solusi Teknologi

Permasalahan di sisi ini ditandai dengan masih terbatasnya kemampuan sumber daya iptek (jumlah SDM, kepakaran, kekayaan intelektual, sarana dan prasarana serta anggaran), kelembagaan iptek (organisasi, regulasi, koordinasi, intermediasi), serta jaringan iptek (intersektor; antarsektor; antarpemangku kepentingan; antarkementrian; serta antarpusat dan daerah)

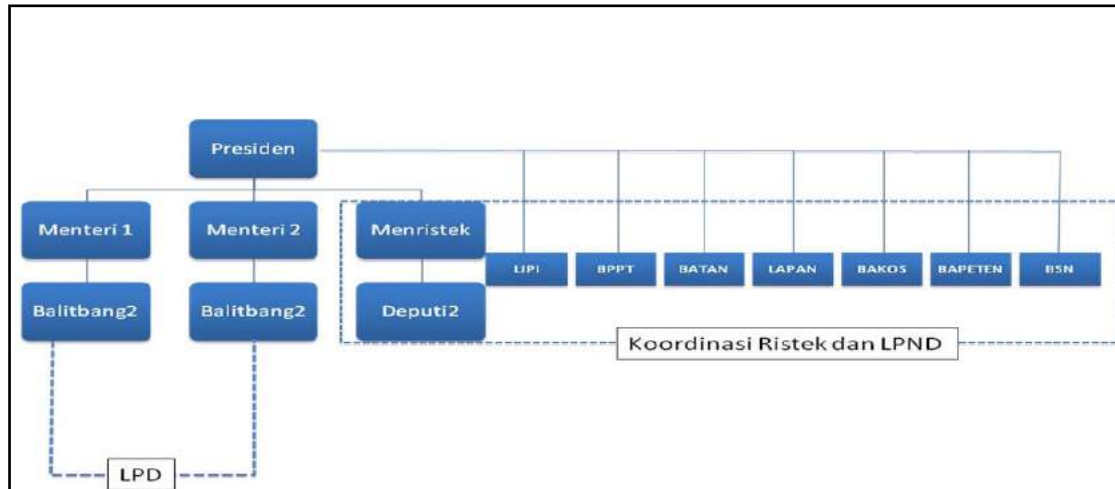
Dari sisi sumberdaya, kemampuan SDM litbang sebagai penyedia solusi teknologi

masih perlu ditingkatkan. Penumbuhan ilmu pengetahuan dalam satu laboratorium membutuhkan paling tidak 3 sampai 5 peneliti yang berkualifikasi setara berpendidikan doktor. Masih banyak bidang iptek yang belum memenuhi batas minimum yang diperlukan. Data publikasi ilmiah di jurnal internasional juga menunjukkan bahwa jumlah, kepakaran dan tingkat pendidikan peneliti di bidang ilmu-ilmu nonhayati seperti fisika, kimia, dan teknik perlu lebih ditingkatkan.

Di sisi anggaran, investasi untuk penguasaan iptek melalui anggaran yang disediakan untuk membiayai kegiatan litbang masih terbatas. Dengan anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBN sejak tahun 2008, investasi pembentukan modal intelektual telah memiliki momentum yang baik. Namun, jumlah lulusan sarjana dan doktor di bidang sains dan perekayasaan, yang mencakup matematika dan ilmu pengetahuan alam, pertanian dan ilmu pengetahuan teknik masih perlu lebih ditingkatkan lagi.

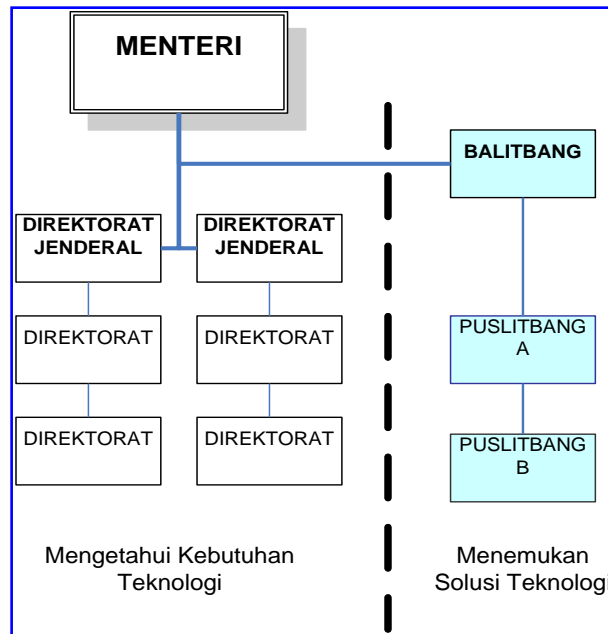
Dari sisi kelembagaan, dapat dijelaskan bahwa di luar perguruan tinggi, pemerintah memiliki dua kategori lembaga penelitian yaitu: lembaga penelitian non-departemen (LPND), dan lembaga penelitian departemen (LPD) yang dimiliki oleh beberapa kementerian, sebagaimana digambarkan pada Gambar 4.2. Koordinasi antarlembaga penelitian itu masih perlu ditingkatkan baik antara program, antara produk penelitian yang ada di berbagai lembaga penelitian, maupun antara program dan produk yang telah dilaksanakan di masa lampau (*re-inventing the wheel syndrome*). Hal itu telah mengakibatkan efisiensi kegiatan litbang di Indonesia menjadi kurang optimal. Upaya untuk mengurangi tumpang tindih dan meningkatkan sinergi kegiatan riset di berbagai lembaga penelitian baik dalam LPND dan / atau LPD terus dilakukan, antara lain, dengan menerbitkan Buku Putih Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Iptek 2005-2025 dan Kebijakan Strategis Nasional (Jakstranas) Iptek 2005-2009 yang selanjutnya dijabarkan oleh DRN ke dalam Agenda Riset Nasional (ARN) 2005-2009. Namun, efektivitas mekanisme pengelolaan riset nasional yang ditujukan untuk menjaga sinergisme antar kegiatan riset seperti yang dibangun dalam ARN, dinilai masih belum terbangun dengan baik.

GAMBAR 4.2
LEMBAGA PENELITIAN PEMERINTAH



Struktur pengelolaan lembaga penelitian departemen yang ada di kementerian pada umumnya, seperti diuraikan pada Gambar 4.3, jajaran direktorat jenderal memiliki tugas pokok dan fungsi di bidang pelayanan umum dan/atau pelaksanaan investasi publik. Dengan tugas pokok itu, jajaran inilah yang paling kompeten mengidentifikasi kebutuhan teknologi di lapangan/masyarakat. Di lain pihak, jajaran penelitian dan pengembangan memiliki tugas pokok menemukan solusi teknologi. Inovasi teknologi terbentuk bila pihak yang mengetahui kebutuhan teknologi berinteraksi secara intens dengan pihak yang bertugas menemukan teknologi. Inovasi tidak serta merta terjadi dalam satu kali interaksi, tetapi muncul secara acak dari interaksi dalam jumlah yang banyak dan dengan intensitas yang tinggi. Di dalam literatur model pengelolaan inovasi yang demikian dinamakan concurrent engineering atau model rugby. Di dalam model ini, untuk meningkatkan produktivitas litbang di suatu organisasi, intensitas komunikasi pihak-pihak yang terlibat dibuat sedemikian rupa sehingga secara bersama mereka menyatu membentuk kesatuan pikir (collective mind). Dari perspektif ini, untuk meningkatkan produktivitas litbang di departemen, perlu pembangunan kelembagaan agar jajaran yang mengetahui kebutuhan teknologi dengan jajaran yang menemukan solusi teknologi berada dalam kesatuan daya pikir .

GAMBAR 4.3
POLA PENGELOLAAN LEMBAGA PENELITIAN DEPARTEMEN



Dalam pengembangan iptek, perguruan tinggi memiliki ciri yang tidak dimiliki baik oleh LPND maupun LPD, yaitu keberadaan mahasiswa sebagai sumberdaya kreatif yang setiap tahun terbarukan. Di negara maju, pengembangan iptek yang bersifat eksploratif dilaksanakan di universitas. Tugas-tugas mahasiswa sering menjadi sumber inspirasi yang segar bagi dosen untuk merumuskan proposal penelitian yang pada gilirannya digunakan untuk mendapatkan hibah riset baik dari pemerintah maupun dari dunia usaha. Bila berhasil, riset tersebut akan dilaksanakan dengan bantuan mahasiswa yang tidak memiliki ikatan kerja permanen untuk jangka waktu yang lama, sehingga dari segi biaya akan murah, tetapi bangkitan ide kreatifnya besar sekali. Untuk itu, mekanisme untuk memanen ide-ide kreatif dari mahasiswa perlu dibangun dengan baik.

Di samping masalah kemampuan individu peneliti, pembangunan komunitas peneliti perlu lebih ditingkatkan. Untuk itu, media komunikasi antar pakar-pakar iptek yang terpisah secara kelembagaan maupun geografis perlu dibangun agar mampu menjadikan mereka sebagai satu kolega kerja yang menumbuhkan ilmu dan pengetahuan dalam skala komunitas yang lebih luas atau yang sering disebut dengan *invisible college*.

Selain itu, kolaborasi antara lembaga litbang pemerintah dan perguruan tinggi dengan industri juga masih lemah. Hal tersebut ditunjukkan oleh rendahnya alokasi dana litbang yang disediakan oleh industri. Tambahan pula, lembaga litbang pemerintah



dan perguruan tinggi belum menjadi sumber gagasan inovasi bagi industri.

4.2.1.2 Permasalahan di Sisi Pengguna Teknologi

Permasalahan di sisi ini ditandai dengan tingginya ketergantungan produk industri nasional terhadap impor serta lemahnya minat dan kontribusi swasta dalam pembangunan iptek nasional.

Ketergantungan industri terhadap produk impor masih sangat tinggi salah satunya disebabkan oleh lemahnya kualitas SDM di industri. Hal ini menyebabkan lemahnya penguasaan serta pengembangan teknologi penunjang industri sehingga sulit diharapkan tercapainya peningkatan produktivitas melalui inovasi-inovasi teknologi. Dari hasil survei BPPT Tahun 2006 terhadap industri kecil menengah, terlihat bahwa walaupun ada perubahan teknis yang dilakukan baik dari sisi produk maupun proses, tidak banyak kegiatan inovasi yang telah dilakukan oleh perusahaan-perusahaan. Hal ini disebabkan oleh: pertama, rendahnya kemampuan teknologi perusahaan, termasuk pengetahuan personel-personelnya yang tidak mendukung perusahaan untuk melakukan kegiatan inovasi. Kedua, besarnya biaya yang diperlakukan untuk melakukan kegiatan inovasi membuat perusahaan tidak memiliki cukup biaya untuk melakukannya. Ketiga, rendahnya permintaan atas produk hasil inovasi juga menjadi alasan tidak dilakukannya kegiatan inovasi oleh perusahaan. Persepsi risiko ini timbul karena ada anggapan di kalangan calon pengguna bahwa teknologi baru yang dikembangkan lembaga litbang belum teruji dengan baik. Kendala lain adalah kesenjangan pengetahuan (*knowledge gap*), biaya terlalu tinggi, risiko permintaan, kemitraan, risiko ekonomi, serta kurangnya personil yang berkualitas.

Selain itu, rendahnya kandungan dalam negeri produk-produk industri nasional adalah akibat lemahnya struktur industri utama dalam membangun industri-industri penunjang dan pemasok bahan baku/antara (*intermediate*) di dalam negeri, lemahnya upaya pengembangan produk, serta tidak adanya koordinasi lintas sektoral yang baik sehingga tuntutan terhadap kebutuhan litbang dan teknologi sangat minim.

Permasalahan lain adalah kesesuaian antara ilmu dan teknologi yang dikembangkan oleh lembaga-lembaga litbang dengan ilmu dan teknologi yang dibutuhkan oleh pengguna masih rendah. Ungkapan bahwa lembaga penelitian tidak menghasilkan produk yang berguna bagi masyarakat dan dunia usaha tidak tertarik menggunakan teknologi hasil penelitian lembaga litbang nasional sering terungkap di berbagai kesempatan.

Seyogyanya hubungan antara penghasil ilmu dan teknologi dengan pihak industri yang membutuhkan terjalin melalui mekanisme pasar dalam bentuk transaksi ekonomi. Hanya dalam hal ini mekanisme pasar tidak dapat bekerja secara sempurna. Untuk itu, perlu intervensi pemerintah baik langsung maupun tidak langsung. Kebijakan yang ada belum cukup. Hal ini ditunjukkan oleh rendahnya transaksi antara lembaga litbang dengan pengguna iptek di industri. Regulasi yang memudahkan terjadinya transaksi

perlu disusun, fasilitas-fasilitas intermediasi yang memudahkan pihak industri menemukan *expertise* yang diperlukan perlu dibangun. Demikian juga, fasilitas publik yang memudahkan industri melakukan pengembangan dan penerapan teknologi baru perlu dibangun. Semua hal itu disebut sebagai masalah koordinasi. Selain itu, diperlukan juga perbaikan pada sistem dan rantai birokrasi agar kondusif untuk meningkatkan sistem inovasi di dunia usaha.

4.2.1.3 Permasalahan Integrasi pada Sisi Penyedia dan Pengguna Teknologi

Permasalahan yang teridentifikasi mencakupi pembangunan iptek yang masih belum menjadi arus utama (*mainstream*); lemahnya sinergi kebijakan iptek (belum optimalnya integrasi program, koordinasi, harmonisasi kegiatan, dukungan anggaran, serta intermediasi, yang terjadi baik intra lembaga/aktor penghasil Iptek, maupun antarpenghasil iptek dengan pengguna iptek, atau secara umum lemahnya koordinasi dan sinergi di antara pemangku kepentingan pembangunan Iptek); masih lemahnya sosialisasi regulasi yang telah ada; dan lemahnya budaya iptek. Budaya bangsa secara umum masih belum mencerminkan nilai-nilai iptek yang mempunyai penalaran obyektif, rasional, maju, unggul dan mandiri. Akibatnya, kesadaran akan pentingnya (*sense of urgency*) terhadap iptek lemah, membuat pembelaan dan dukungan terhadap industri strategis menjadi marjinal.

4.2.2 Sasaran Pembangunan

Dengan memperhatikan kondisi umum dan permasalahan yang dihadapi, sasaran pembangunan iptek dari tahun 2010 hingga 2014 adalah:

1. tercapainya penguatan kelembagaan iptek untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas litbang di Indonesia;
2. tercapainya penguatan sumber daya iptek dalam bentuk: peningkatan jumlah, pendidikan, dan kompetensi peneliti, peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana penelitian, dan peningkatan kegiatan penelitian itu sendiri;
3. tercapainya penguatan jaringan iptek melalui jalinan kerjasama antar sisi penyedia dan antara sisi penyedia teknologi dengan sisi pengguna yang lebih intens dan lebih produktif.
4. meningkatnya kemampuan nasional dalam pengembangan, penguasaan, dan penerapan iptek yang ditunjukkan dalam bentuk publikasi di jurnal ilmiah internasional, paten, prototip, layanan teknologi bagi pengguna, serta meningkatnya kemampuan keteknikan nasional, serta tumbuhnya wirausahawan inovatif berbasis pengetahuan dan teknologi.
5. meningkatnya relevansi kegiatan riset dengan persoalan dan kebutuhan riil yang dibarengi dengan peningkatan kesadaran masyarakat akan ilmu pengetahuan



yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan penghargaan masyarakat bagi kegiatan penelitian dan pengembangan.

4.3 Arah Kebijakan Pembangunan

4.3.1 Arah Pembangunan Iptek Menurut RPJPN 2005-2025

Pasal 31 Ayat 5 UUD 1945 hasil Amandemen ke-4 menyebutkan bahwa “Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk memajukan peradaban serta kesejahteraan umat manusia”. Dengan amandemen ini, ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) mempunyai peran penting bagi upaya pencapaian kemajuan bangsa dan kesejahteraan rakyat. Akan tetapi, pembangunan iptek hanya akan memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan nasional dalam upaya meningkatkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat jika produk yang dihasilkan bisa didayagunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atau dapat menjadi solusi bagi permasalahan nyata baik yang dihadapi pemerintah maupun masyarakat.

Selanjutnya, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 menyatakan bahwa visi pembangunan nasional adalah menuju Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur. Visi tersebut dicapai melalui 8 (delapan) misi pembangunan yang salah satu di antaranya adalah mewujudkan bangsa yang berdaya saing. Pembangunan daya saing bangsa dilaksanakan dengan: (1) membangun SDM yang berkualitas; (2) memperkuat perekonomian domestik; (3) meningkatkan penguasaan, pengembangan, dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi; (4) membangun sarana dan prasarana yang memadai dan maju; serta (5) melakukan reformasi hukum dan birokrasi.

Dalam rangka memperkuat perekonomian domestik yang berorientasi dan berdaya saing global, pembangunan diarahkan untuk melakukan transformasi bertahap dari perekonomian yang berbasis keunggulan komparatif sumber daya alam menjadi perekonomian yang berkeunggulan kompetitif. Upaya tersebut dilakukan dengan prinsip-prinsip dasar: mengelola peningkatan produktivitas nasional melalui inovasi, penguasaan, penelitian, pengembangan dan penerapan iptek menuju ekonomi berbasis pengetahuan serta kemandirian dan ketahanan bangsa secara berkelanjutan; mengelola kelembagaan ekonomi yang melaksanakan praktik terbaik dan pemerintahan yang baik secara berkelanjutan, dan mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan

Pengembangan iptek untuk ekonomi diarahkan pada peningkatan kualitas dan pemanfaatan iptek nasional dalam rangka mendukung daya saing secara global. Hal itu dilakukan melalui peningkatan, penguasaan, dan penerapan iptek secara luas dalam sistem produksi barang/jasa, pembangunan pusat-pusat keunggulan iptek, pengembangan lembaga penelitian yang andal, pewujudan sistem pengakuan terhadap hasil penemuan dan hak atas kekayaan intelektual, pengembangan dan penerapan

standar mutu peningkatan kualitas dan kuantitas SDM iptek, peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana iptek. Berbagai langkah tersebut dilakukan untuk mendukung pembangunan ekonomi yang berbasis pengetahuan.

Pembangunan iptek diarahkan untuk menciptakan dan menguasai ilmu pengetahuan baik ilmu pengetahuan dasar maupun terapan, dan mengembangkan ilmu sosial dan humaniora, serta untuk menghasilkan teknologi dan memanfaatkan teknologi hasil penelitian. Pengembangan, dan perkerjasama bagi kesejahteraan masyarakat, kemandirian, dan daya saing bangsa melalui peningkatan kemampuan dan kapasitas iptek senantiasa berpedoman pada nilai agama, nilai budaya, nilai etika, kearifan lokal, serta memerhatikan sumber daya dan kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Pembangunan iptek diarahkan untuk mendukung ketahanan pangan dan energi; penciptaan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi; penyediaan teknologi transportasi, kebutuhan teknologi pertahanan, dan teknologi kesehatan; pengembangan teknologi material maju; serta peningkatan jumlah penemuan dan pemanfaatannya dalam sektor produksi. Dukungan tersebut dilakukan melalui pengembangan sumber daya manusia iptek, peningkatan anggaran riset, pengembangan sinergi kebijakan iptek lintas sektor, perumusan agenda riset yang selaras dengan kebutuhan pasar, peningkatan sarana dan prasarana iptek, dan pengembangan mekanisme intermediasi iptek. Dukungan tersebut dimaksudkan untuk penguatan sistem berbasis pengetahuan. Di samping itu, diupayakan peningkatan kerjasama penelitian domestik dan internasional antarlembaga penelitian dan pengembangan (litbang), perguruan tinggi dan dunia usaha serta penumbuhan industri baru berbasis produk litbang dengan dukungan modal ventura.

Budaya inovatif yang berorientasi iptek terus dikembangkan agar bangsa Indonesia menguasai iptek serta mampu berjaya pada era persaingan global. Pengembangan budaya iptek tersebut dilakukan dengan meningkatkan penghargaan masyarakat terhadap iptek melalui pengembangan budaya membaca dan menulis, masyarakat pembelajar, masyarakat yang cerdas, kritis, dan kreatif dalam rangka pengembangan tradisi iptek dengan mengarahkan masyarakat dari budaya konsumtif menuju budaya produktif. Bentuk-bentuk pengungkapan kreativitas, antara lain, melalui kesenian, tetap didorong untuk mewujudkan keseimbangan aspek materiel, spiritual, dan emosional. Pengembangan iptek dan kesenian diletakkan dalam kerangka peningkatan harkat, martabat, dan peradaban manusia.

4.3.2 Arah Pembangunan Iptek 2010--2014

Prinsip penggalangan kompetisi dan kerjasama untuk membangkitkan industri hasil inovasi dilakukan dengan cara mengelola interaksi serta hubungan-hubungan antarelemen pendukung, mengefektifkan interaksi antarlembaga penghasil teknologi (LPND penelitian, Balitbang kementerian, daerah serta perguruan tinggi), interaksi ke

luar dengan dunia usaha agar inovasi dapat mewujudkan dalam penyediaan barang dan jasa yang bermanfaat bagi masyarakat.

Kunci keberhasilan implementasi penguatan sistem inovasi di suatu negara adalah koherensi kebijakan inovasi dalam dimensi antarsektor dan lintas sektor; intertemporal (antarwaktu); dan nasional-daerah (interteritorial), daerah-daerah, dan internasional. Dalam perspektif hubungan nasional-daerah, koherensi kebijakan inovasi dalam penguatan SIN di Indonesia perlu dibangun melalui kerangka kebijakan inovasi (*innovation policy framework*) yang sejalan, dengan sasaran dan *milestones* terukur, serta komitmen sumberdaya yang memadai baik pada tataran pembangunan nasional maupun daerah sebagai *platform* bersama.

Dengan demikian kebijakan Iptek diarahkan kepada :

1. meningkatkan kapasitas dan kapabilitas kelembagaan litbang dan lembaga pendukung untuk mendukung proses transfer dari ide → prototip laboratorium prototip industri → produk komersial (penguatan sistem inovasi nasional);
2. meningkatkan kapasitas dan kapabilitas sumber daya iptek untuk menghasilkan produktivitas litbang yang berdayaguna bagi sektor produksi dan meningkatkan budaya inovasi serta kreativitas nasional;
3. mengembangkan dan memperkuat jejaring kelembagaan baik peneliti di lingkup nasional maupun internasional untuk mendukung peningkatan produktivitas litbang dan peningkatan pendayagunaan litbang nasional;
4. meningkatkan kreativitas dan produktivitas litbang untuk ketersediaan teknologi yang dibutuhkan oleh industri dan masyarakat serta menumbuhkan budaya kreativitas masyarakat;
5. meningkatkan pendayagunaan iptek dalam sektor produksi untuk peningkatan perekonomian nasional dan penghargaan terhadap iptek dalam negeri.

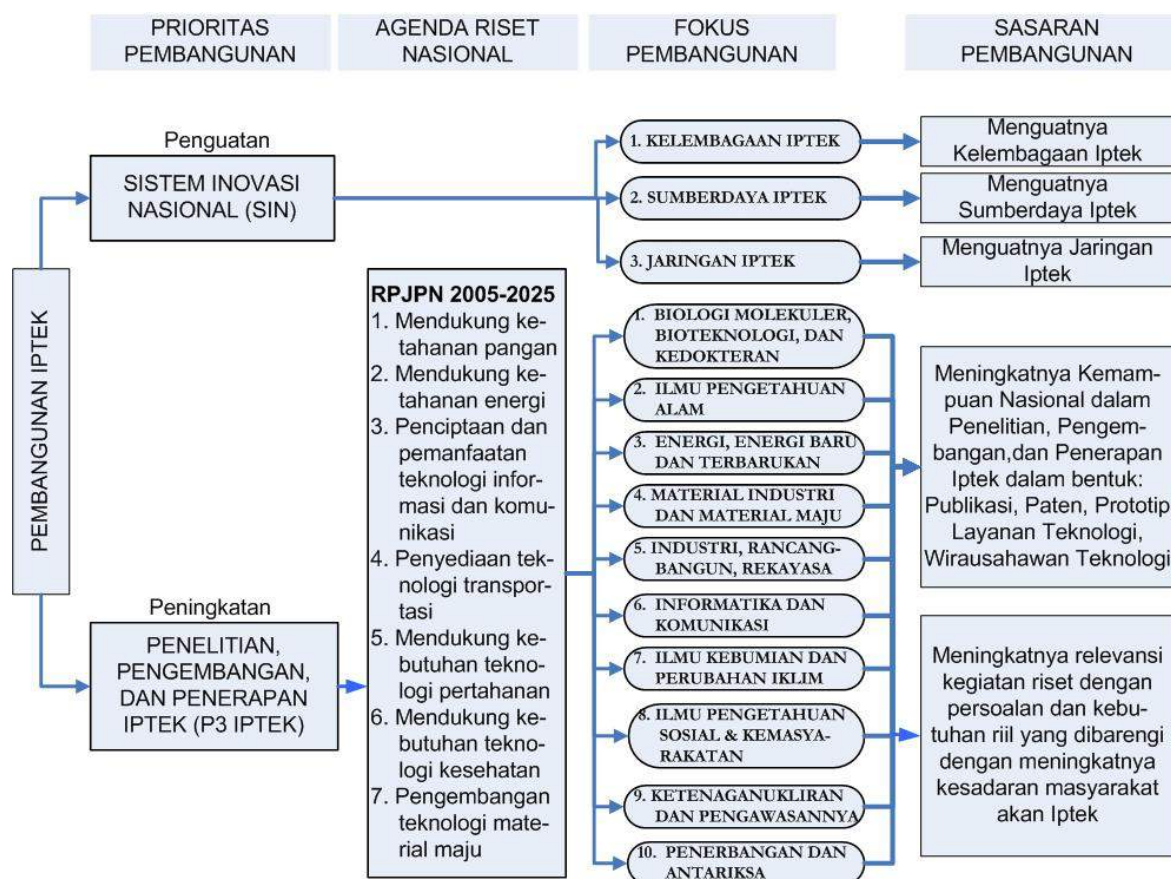
4.3.3 Strategi Pembangunan Iptek

Dengan arah kebijakan Iptek tersebut di atas, maka strategi pembangunan Iptek dilaksanakan melalui dua prioritas pembangunan yaitu:

1. **Penguatan Sistem Inovasi Nasional (SIN)** yang berfungsi sebagai wahana pembangunan Iptek menuju visi pembangunan Iptek dalam jangka panjang.
2. **Peningkatan Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Iptek (P3 Iptek)** yang dilaksanakan sesuai dengan arah yang digariskan dalam RPJPN 2005-2025.

Selanjutnya strategi pembangunan Iptek ini dijabarkan ke dalam kerangka pembangunan Iptek sebagaimana dalam Gambar 4.4 berikut.

GAMBAR 4.4
KERANGKA PEMBANGUNAN IPTEK



A Penguatan Sistem Inovasi Nasional (SIN)

Seperti yang dipaparkan di atas, RPJPN 2005--2025 mengarahkan agar dalam mentransformasikan perekonomian dari yang berbasis keunggulan komparatif sumber daya alam ke perekonomian yang berbasis keunggulan kompetitif dilakukan dengan prinsip dasar mengelola peningkatan produktivitas nasional melalui inovasi. Hal ini membutuhkan cara pandang dan tindakan yang sistemik dan sistematis dalam sistem inovasi nasional (SIN).

SIN Indonesia diatur melalui Undang-Undang No. 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Sisnasiptek). Undang-undang ini memberikan landasan hukum bagi pengaturan pola hubungan yang saling memperkuat antara unsur penguasaan, pemanfaatan, dan pemajuan iptek dalam satu keseluruhan yang utuh untuk mencapai tujuan. Selanjutnya

unsur yang dimaksud dalam SIN terdiri atas unsur kelembagaan, unsur sumber daya, dan unsur jaringan iptek dengan penjelasan sebagai berikut.

1. **Kelembagaan** ilmu pengetahuan dan teknologi terdiri atas perguruan tinggi, lembaga litbang, badan usaha, dan lembaga penunjang yang berfungsi untuk (1) mengorganisasikan pembentukan sumber daya manusia, penelitian, pengembangan, perekayasaan, inovasi, dan difusi teknologi; dan (2) membentuk iklim dan memberikan dukungan yang diperlukan bagi penyelenggaraan penguasaan, pemanfaatan, dan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Fungsi tiap-tiap unsur kelembagaan ini adalah sebagai berikut:
 - a. perguruan tinggi sebagai salah satu unsur SIN berfungsi membentuk sumber daya manusia iptek;
 - b. lembaga litbang baik milik pemerintah pusat, pemerintah daerah, perguruan tinggi, badan usaha, maupun organisasi masyarakat berfungsi menumbuhkan kemampuan pemajuan iptek dan bertanggung jawab mencari berbagai invensi serta menggali potensi pemanfaatannya;
 - c. badan usaha sebagai salah satu unsur SIN berfungsi menumbuhkan kemampuan perekayasaan, inovasi, dan difusi teknologi untuk menghasilkan barang dan jasa yang memiliki nilai ekonomis dengan mengusahakan pendayagunaan manfaat keluaran yang dihasilkan oleh perguruan tinggi dan lembaga litbang.
2. **Sumber daya** iptek terdiri atas keahlian, kompetensi manusia dan pengorganisasiannya, kekayaan intelektual dan informasi, serta sarana dan prasarana iptek. Setiap unsur kelembagaan iptek bertanggung jawab meningkatkan secara terus menerus daya guna dan nilai guna sumber dayanya.
3. **Jaringan** iptek berfungsi membentuk jalinan hubungan interaktif yang kreatif dan memadukan unsur-unsur kelembagaan iptek untuk menghasilkan kinerja dan manfaat yang lebih besar dari keseluruhan yang dapat dihasilkan oleh setiap unsur kelembagaan secara sendiri-sendiri. Jaringan terbentuk oleh adanya kemitraan antar unsur kelembagaan, berdasarkan adanya saling kepentingan antara tiga pilar utama pembentuk interaksi yang kreatif, saling mengisi, melengkapi dan memperkuat, yaitu (1) pengembangan kawasan, (2) pengelompokan litbang tematis, dan (3) pelayanan jasa dan produk bernilai ekonomis.

Dalam rangka penguatan sistem inovasi nasional (SIN) pembangunan difokuskan pada penguatan ketiga unsur-unsurnya, yaitu sebagai berikut.

1. **Penataan kelembagaan iptek** dilakukan dengan hasil terbangunnya tata kelola litbang yang efisien dan efektif dan yang mampu mendorong kreativitas dan profesionalisme masyarakat iptek, serta terbangunnya kesadaran iptek dan mendorong partisipasi masyarakat.

Untuk mencapai hasil tersebut, akan dilaksanakan berbagai kegiatan pembangunan dengan keluaran-keluaran sebagai berikut:

- a. regulasi untuk meningkatkan sinkronisasi kegiatan litbang dengan pola pengelolaan keuangan negara, perencanaan dan penganggaran, serta otonomi daerah;
 - b. regulasi untuk membangun sistem *reward and punishment* yang adil dan menyejahterakan;
 - c. kegiatan sosialisasi untuk menciptakan dan meningkatkan pemahaman teknologi di masyarakat.
2. **Penguatan Sumber daya iptek** dilakukan dengan hasil terbangunnya pusat-pusat keunggulan pengetahuan regional dan tematis yang kompeten mendukung pemenuhan kebutuhan strategis nasional.

Untuk mencapai hasil tersebut akan dilaksanakan kegiatan pembangunan dengan keluaran-keluaran sebagai berikut:

- a. peneliti yang berhasil menyelesaikan pendidikan doktor dari universitas unggulan baik di dalam maupun di luar negeri;
 - b. pelatihan peneliti untuk keterampilan khusus dan lanjut di laboratorium-laboratorium terkemuka di dunia;
 - c. pengoperasian dan revitalisasi dan maksimalisasi fasilitas-fasilitas riset yang ada untuk kepentingan pelatihan, penelitian, sistem penjaminan mutu terpadu dan inovasi;
 - d. pembangunan sarana dan prasarana riset baru yang mendukung pelatihan, penelitian dan inovasi bertaraf internasional.
 - e. pembangunan pusat-pusat penelitian maju dan interdisipliner bertaraf internasional.
3. **Penataan jaringan iptek** dilakukan dengan hasil terbangunnya pola hubungan kerja sama antar lembaga litbang (lemlit); antarlemlit dengan perguruan tinggi; dan antara lemlit dan industri/masyarakat pengguna berikut faktor-faktor pendukungnya, khususnya infrastruktur komunikasi dan transportasi yang modern, institusi finansial, serta otoritas publik yang memfasilitasi struktur jaringan yang mendorong interaksi kreatif dan lingkungan yang atraktif bagi para pekerja pengetahuan (*knowledge workers*).

Untuk mencapai hasil tersebut, akan dilaksanakan kegiatan pembangunan dengan dengan keluaran-keluaran sebagai berikut:

- a. regulasi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi hubungan kerja sama antarlembaga litbang dan antara lemlit dan perguruan tinggi;
- b. terbangunnya pusat-pusat pengetahuan dan teknologi tematis dalam tingkat nasional dan regional sebagai bagian dari dan terintegrasi dengan

“teknopolis” Indonesia yang melibatkan kluster pengetahuan tertentu, pengembangan kawasan, dan pelayanan jasa.

- c. terbangunnya pusat-pusat intermediasi yang menghubungkan antara lemlit dan industri / masyarakat pengguna;
- d. tersedianya pusat purwarupa (*prototype center*) di beberapa kota;
- e. perumusan standar nasional Indonesia (SNI) untuk menjamin kualitas proses produksi, sesuai dengan kebutuhan pasar, perkembangan teknologi dan standar internasional, serta untuk memperkuat penilaian kesesuaian yang terkait erat dengan kegiatan akreditasi dan sertifikasi.

B Penelitian, Pengembangan, Dan Penerapan Iptek (P3 Iptek)

RPJPN 2005--2025 menyatakan secara eksplisit bahwa pembangunan iptek diarahkan untuk mendukung ketahanan pangan dan energi; penciptaan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi; penyediaan teknologi transportasi, kebutuhan teknologi pertahanan, teknologi kesehatan; pengembangan teknologi material maju, dengan penjelasan sebagai berikut.

1. Penelitian, pengembangan dan penerapan iptek untuk mendukung **ketahanan pangan**, bertujuan untuk mengembangkan teknologi bibit-bibit pangan unggulan dengan produktivitas tinggi dan teknologi pascapanen dalam mendukung swasembada pangan dan kemandirian industri pangan nasional.
2. penelitian, pengembangan, dan penerapan iptek untuk mendukung **energi** baru terbarukan bertujuan untuk mengembangkan teknologi pembangkit listrik nasional dari sumber energi baru dan terbarukan (di antaranya yang berasal dari energi surya, angin, panas bumi, air, nuklir, arus laut, dan lainnya.) sesuai dengan kebijakan energi nasional.
3. penelitian, pengembangan dan penerapan iptek untuk mendukung teknologi **informasi dan komunikasi** bertujuan untuk mengembangkan teknologi informasi dan komunikasi nasional guna mengurangi kesenjangan informasi, pembajakan IPR dan belanja teknologi impor.
4. Penelitian, pengembangan, dan penerapan iptek untuk mendukung teknologi **transportasi** bertujuan untuk mengembangkan teknologi dan manajemen transportasi nasional dalam mendukung gugus (*kluster*) industri alat transportasi nasional.
5. Penelitian, pengembangan, dan penerapan iptek untuk mendukung teknologi **pertahanan dan keamanan** bertujuan untuk membangun kemampuan di dalam negeri dalam upaya merancang, membuat dan mengoperasikan sendiri peralatan pertahanan dan keamanan, yang mencakup:

- a. teknologi rancang bangun dan rekayasa serta produksi perangkat pendukung daya gerak untuk matra darat, laut, dan udara;
 - b. teknologi produksi dan rekayasa perangkat pendukung daya tempur sistem senjata standar tempur infantri (pistol, senapan, senapan mesin, mortir, senjata lawan tank) yang mencakup bahan baku baik logam maupun plastik, munisi dan bahan peledak, serta berbagai jenis senjata berat;
 - c. teknologi komunikasi dan informasi yang antara lain teknologi radar untuk pengawas pantai (*coastal surveillance Radar*), maritim, navigasi udara dan laut, cuaca, serta untuk deteksi benda benda di bawah tanah;
 - d. teknologi produksi bekal.
6. Penelitian, pengembangan, dan penerapan iptek untuk mendukung teknologi **kesehatan dan obat** bertujuan untuk mengembangkan teknologi alat kesehatan dan obat khususnya obat alami untuk mendukung klaster industri kesehatan dan industri farmasi nasional.
 7. Penelitian, pengembangan dan penerapan iptek untuk mendukung teknologi **material maju** bertujuan untuk mengembangkan teknologi material baru untuk meningkatkan kandungan lokal, memperkuat industri pendukung dan pohon industri nasional, serta mendukung industri masa depan yang memerlukan penemuan material baru.

Presiden/Wakil Presiden Susilo Bambang Yudhoyono – Budiono telah menetapkan 11 (sebelas) prioritas nasional dalam program pembangunan Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II, yakni sebagai berikut:

1. reformasi birokrasi dan tata kelola;
2. pendidikan;
3. kesehatan;
4. penanggulangan kemiskinan;
5. ketahanan pangan;
6. infrastruktur;
7. iklim investasi dan bisnis;
8. energi;
9. lingkungan hidup dan penanggulangan bencana;
10. pembangunan daerah tertinggal, terdepan dan pasca konflik;
11. kebudayaan, kreatifitas dan inovasi teknologi.

Dengan mengacu pada arahan RPJPN 2005--2025 di atas serta sebelas prioritas nasional program pembangunan Kabinet Indonesia Bersatu II, akan disusun Agenda Riset Nasional (ARN) 2010--2014.

Agar bersesuaian dengan arah reformasi program dan kegiatan dalam administrasi perencanaan dan penganggaran, fokus pembangunan dalam rangka peningkatan P3 Iptek adalah gugus (*kluster*) pusat-pusat penelitian pengembangan yang setingkat dengan unit kerja eselon dua (UKE II), yaitu sebagai berikut:

1. **Biologi molekuler, bioteknologi, dan kedokteran** diharapkan dapat mendukung ARN dalam bidang ketahanan pangan dan kesehatan serta prioritas nasional dalam mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.

Dalam bidang biologi molekuler hasil yang diharapkan adalah sumbangan ilmiah dalam mengungkap genetik berbagai penyakit tropis yang strategik; penguasaan ilmu dasar kedokteran molekul, diagnosis molekuler, serta teknologi identifikasi DNA. Untuk itu keluaran kegiatan litbang biologi molekuler yang diharapkan adalah sebagai berikut:

- a. satu set informasi kelainan genetik sel darah merah;
- b. satu set informasi keanekaragaman genom manusia dan penyakit;
- c. terungkapnya kelainan transduksi energi dan penyakit degenerasi, keganasan, dan infeksi;
- d. satu set informasi keanekaragaman genetik Hepatitis B dan C di Indonesia;
- e. terungkapnya dasar molekuler penyakit parasitik terutama malaria;
- f. satu set hasil penambangan data (*data mining*) untuk kedokteran molekul;
- g. satu set metode diagnosis penyakit genetik;
- h. satu set metode penerapan teknologi identifikasi DNA;
- i. meningkatnya ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana riset biologi molekuler;
- j. terbangunnya sistem analisis dan manajemen data genomik;
- k. satu set informasi genetik dan molekuler termasuk tidak terbatas pada protein terapeutik sumber daya alam keanekaragaman hayati Indonesia untuk mendukung kegiatan riset dan industri dalam bidang kesehatan;
- l. terungkapnya potensi jasad renik dan keanekaragaman hayati Indonesia untuk pengembangan obat penyakit degeneratif;
- m. satu set metode rekayasa genetik untuk produksi protein terapeutik dalam eucaryota (*molecular farming/molecular pharming*);
- n. meningkatnya ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana riset biologi molekuler dan bioteknologi.

Dalam bidang bioteknologi pertanian hasil yang diharapkan adalah sumbangan ilmiah untuk meningkatkan produktivitas, mutu, dan mengurangi biaya produksi, serta menciptakan produk, sarana produksi yang ramah lingkungan. Untuk itu, keluaran kegiatan litbang dalam bidang bioteknologi pertanian adalah sebagai berikut:

- a. peta hasil eksplorasi gen-gen penting dan sekuen genom hewan, tanaman dan mikroba yang berguna dalam perakitan genetik;
- b. terungkapnya biokimia molekuler, dan struktur biologi yang menjadi dasar pertumbuhan tanaman dan hewan;

- c. terciptanya galur-galur unggul yang dapat merespons kondisi lingkungan ekstrem (cekaman abiotik dan biotik), seperti kekeringan, lahan asam, salinitas tinggi dan lain-lain;
- d. terciptanya bibit dan benih unggul yang mempunyai produktivitas tinggi, tahan terhadap hama dan penyakit (meningkatkan produktivitas lahan), komposisi gizi yang lebih baik dan diminati pasar;
- e. diperolehnya informasi biokimia dan mekanisme *genetic control* dalam metabolisme pada hewan, tanaman, dan mikroba potensi untuk pengembangan produk bahan pangan baru ataupun bahan kimia untuk keperluan industri dan farmasi;
- f. Satu set teknik dan metode untuk pengujian keamanan pangan.

Dalam bidang bioteknologi lingkungan, hasil yang diharapkan adalah penguasaan dan penerapan bioteknologi untuk merehabilitasi kerusakan lingkungan. Untuk itu, keluaran kegiatan litbang bioteknologi lingkungan adalah sebagai berikut:

- a. terungkapnya mikroorganisme dalam habitat alam dan dinamikanya dalam merespon dinamika lingkungan akibat secara alamiah maupun sebagai akibat tekanan aktivitas manusia;
- b. terungkapnya mekanisme biokimia dalam degradasi polutan secara aerobik dan anaerobik;
- c. terungkapnya dan termanfaatkannya genetik mikroorganisme yang mampu mendegradasi polutan;
- d. terbangunnya infrastruktur pengamanan plasma nutfah (*specimen bank, culture collection*);
- e. satu set teknik yang *cost-effective* dalam penanganan limbah;
- f. satu set metode, teknik pengujian dan evaluasi termasuk biokontrol dan biosensor untuk *monitoring* kerusakan dan penanganan lingkungan.

Dalam bidang bioteknologi industri (bioproses) hasil yang diharapkan adalah dikuasainya proses yang lebih bersih, pengurangan biaya proses produksi, dan penciptaan produksi baru. Untuk itu, keluaran kegiatan litbang bioteknologi industri adalah sebagai berikut:

- a. ditemukannya galur unggul yang potensial untuk industri, pengembangan metode dan teknik untuk meningkatkan produktivitas dalam peningkatan skala produksi, dan mencegah *biopiracy*;
- b. dikuasainya rekayasa proses hilir untuk proses separasi dan pemurnian dalam industri pengolahan;
- c. satu set informasi tentang kearifan lokal yang mempunyai nilai tambah dan metode pemeliharaan dan pemanfaatannya;
- d. satu set penerapan bioproses untuk pengembangan produk dan proses baru yang efisien yang dapat mengurangi biaya produksi dan menurunkan tingkat pencemaran;

- e. satu set metode untuk pemantauan dan kontrol bioproses di industri yang salah satu contohnya adalah pengembangan biosensor dan aplikasinya;
- f. penguasaan pembuatan biomaterial, biomimetik, biomembran, bioplastik, dan lain-lain yang berbasis biodiversitas Indonesia.

Dalam bidang bioteknologi farmasi dan kedokteran hasil yang diharapkan adalah meningkatnya kemampuan menerapkan bioteknologi untuk memanfaatkan kekayaan plasma nutfah Indonesia untuk bahan obat dan kesehatan lainnya. Untuk itu, keluaran kegiatan litbang bioteknologi farmasi dan kesehatan adalah sebagai berikut:

- a. dikuasainya teknik bioprospeksi plasma nutfah untuk memproduksi bahan-bahan farmasi;
 - b. ditemukannya bahan obat berdasarkan terapi protein (antikanker, antianemia, antivirus seperti flu burung dan aids);
 - c. satu set teknik hilir (*downstream*) untuk produksi obat berbasis protein;
 - d. satu set teknologi produksi obat berbasis DNA rekombinan dengan menggunakan keunggulan komparatif Indonesia, seperti molecular farming dan molecular pharming;
 - e. prototip berbagai kit diagnosa untuk kesehatan.
2. **Ilmu pengetahuan alam** yang mencakup kegiatan litbang di bidang biologi, fisika, kimia, oseanografi, serta konservasi tumbuhan kebun raya. Keluaran dari litbang ini diharapkan dapat mendukung ARN di bidang ketahanan pangan, kesehatan, serta material maju.

Litbang kimia diarahkan untuk dapat menghasilkan

- a. prototip proses dan produk litbang *biodegradable polymer* untuk industri kimia, bahan kimia adi (*fine chemical*), industri farmasi, dan industri lainnya;
- b. prototip proses dan produk litbang polimer berbasis minyak alam seperti CPO dan berbagai minyak tanaman lainnya sebagai aditif plastik untuk bahan pengemas (*packaging*) dan produk plastik, produksi *polyurethane*, *poliol*, nanoemulsi dan asam lemak turunan;
- c. polimer alam sebagai material baru untuk aplikasi bahan bangunan, alat transportasi, ataupun bahan pendukungnya;
- d. komposit hidrogel berbasis selulosa untuk pertanian di lahan kering;

Dalam bidang oseanografi, hasil litbang diharapkan dapat membantu upaya nasional dalam bidang ketahanan pangan, perlindungan ekosistem pantai, perubahan iklim dan kegiatan antropogenik lainnya, serta meningkatnya kapasitas kelembagaan oseanografi. Untuk itu, keluaran kegiatan litbang oseanografi yang diharapkan adalah sebagai berikut:

- a. terungkapnya potensi sumber daya laut dalam bentuk produk hasil laut sebagai bahan obat yang dikembangkan dari makro algae dan sponge, penelitian biota laut potensial dan bernilai tinggi, dan pengembangan sumber protein selain ikan (abalon dan rajungan);
- b. paket model pengelolaan terumbu karang, satu paket rekomendasi ilmiah pengelolaan ekosistem laut dan pantai, serta ditemukannya bahan penanggulangan pencemaran minyak di pantai, melakukan kerja sama riset keanekaragaman hayati kelautan, meneliti biota laut langka, sekaligus memberikan dukungan ilmiah bagi terbentuknya kawasan-kawasan konservasi laut yang dilindungi;
- c. terungkapnya informasi tentang tingkat kemampuan ekosistem mangrove, terumbu karang, dan padang lamun sebagai karbon rosot (*carbon sink*) atau sebagai pengikat gas asam arang (karbon dioksida);
- d. meningkatkan kerja sama riset kelautan strategis untuk menjadikan Indonesia sebagai salah satu pusat riset kelautan dunia.

Dalam bidang teknologi survei kelautan hasil yang diharapkan adalah meningkatnya kesiapan dan kualitas jasa riset dan survei kelautan sesuai dengan standar. Untuk itu, kelautan dalam kegiatan litbang yang diharapkan adalah sebagai berikut:

- a. terpeliharanya sarana dan prasarana survei kelautan, terselesaikannya standardisasi dan sertifikasi kapal riset baruna jaya dengan peralatan surveinya, serta terbangunnya basis data dan informasi dalam bidang survei kelautan;
- b. terpasang dan terpeliharanya buoys tsunameter yang tersebar di perairan Indonesia;
- c. paket hasil kajian dan penerapan teknologi survei kelautan untuk eksplorasi sumber daya energi dan mineral lepas pantai, serta untuk pengembangan kewilayahan dan infrastruktur kelautan.

Konservasi tumbuhan di kebun raya diarahkan untuk mengidentifikasi, memelihara, serta menguasai pemanfaatan sumber daya hayati, baik flora maupun fauna Indonesia dengan rincian keluaran sebagai berikut:

- a. terlaksananya fungsi kebun raya di Bogor, Cibodas, Purwodadi, dan Bali sebagai tempat konservasi *exsitu* spesimen tumbuhan Indonesia dan sebagai tempat reintroduksi tumbuhan dalam rangka restorasi atau pemulihan populasi tumbuhan yang terancam kepunahan habitat alaminya;
- b. sejumlah kebun raya di beberapa daerah terpilih melalui kerja sama dengan daerah, ditopang dengan segenap unsur sumber daya daerah yang bersangkutan;
- c. tersedianya informasi hasil eksplorasi, inventarisasi, karakterisasi, dan valuasi keanekaragaman hayati Indonesia dengan ekosistemnya yang

- dapat dimanfaatkan bagi (a) mitigasi dan adaptasi bagi perubahan iklim, (b) cagar biosfer untuk mengharmonisasikan kegiatan konservasi dan pembangunan ekonomi, (c) tanaman asli Indonesia untuk industri kehutanan, bahan baku alternatif pengganti kayu, dan (d) meningkatkan efisiensi dan memperlambat emisi gas karbon;
- d. informasi pemanfaatan keanekaragaman hayati Indonesia yang diperoleh melalui bioprospeksi untuk keperluan pangan, kesehatan, dan lingkungan;
 - e. terkelolanya koleksi spesimen, baik flora dan fauna hidup maupun yang diawetkan;
 - f. kelengkapan sarana dan prasarana penyimpanan, pemeliharaan, dan pengelolaan mikroba rujukan, bank biji, bank DNA, *tissue culture*, dan bank *extract*;
3. **Energi, Energi Baru dan Terbarukan** yang mencakup kegiatan litbang dalam bidang sumber daya energi, konservasi dan konversi energi, serta tenaga listrik dan mekatronika yang diarahkan untuk mendukung ARN dibidang energi.

Dalam bidang energi kelistrikan diharapkan terjadi peningkatan kemampuan nasional dalam mengembangkan dan memanfaatkan sumber energi yang tersedia dalam jumlah yang besar seperti energi surya, panas bumi, tenaga angin, tenaga dari ombak dan arus laut, serta batu bara bersih. Untuk itu keluaran dari kegiatan litbang dalam bidang energi kelistrikan di antaranya adalah sebagai berikut:

- a. sistem modulasi energi panas bumi 1 MW melalui tahapan pilot plant skala 100 kW hasil SDM dan industri dalam negeri, paket-paket teknologi pemanfaatan panas bumi untuk pertanian, perkebunan, dan pariwisata;
- b. perangkat pembangkit listrik tenaga surya fotovoltaik berupa sistem penyimpan energi listrik (*battery bank*) dan sistem kWh-meter, sistem inverter dan controller, serta *pilot-plant* fabrikasi sel surya teknologi silikon *crystalline* berkapasitas 1,5 MW per tahun;
- c. cetak biru "*solar thermal pump*", perangkat pengering solar termal untuk kayu dengan kapasitas 100 meter kubik, untuk pascapanen dengan kapasitas 50 kg – 3 ton per batch, serta diseminasi dan sosialisasi penggunaan energi panas matahari ini;
- d. prototip pembangkit listrik tenaga angin tipe terapung di laut dengan kapasitas 10 kW, prototip PLT ombak mini 20kW, dan pengembangan teknologi produksi energi berbasis gelombang arus laut;
- e. paket teknologi pemakaian bahan bakar batu bara rendah kalori (lebih rendah dari 4500 kilo kalori/kg) dan biomassa dengan menerapkan berbagai teknologi bersih pengolahan batu bara;
- f. paket teknologi produksi energi berbasis biomassa (*biopremium*, *biodiesel* berbasis *microalgae*, biogas, dan hidrogen)

- g. pengembangan teknologi pembangkit energi surya terkonsentrasi (*concentrated solar power*) berskala 5-10 kW.

Dalam bidang teknologi bahan bakar nabati (BBN), hasil litbang yang diharapkan adalah meningkatnya penguasaan dan pemanfaatan bahan bakar nabati yang mencakup bioetanol, biodisel, minyak nabati asli, serta teknologi pembuatan *green diesel* dan *green gasoline*. Untuk itu keluaran kegiatan litbang yang diharapkan adalah sebagai berikut:

- a. *Pilot plant* teknologi bioproduksi bioethanol dengan kemurnian 99,5% dengan bahan baku sagu dengan kapasitas 8 kiloliter/hari dan bahan baku lignosellulosa skala lab 2 liter, teknologi dehidrasi bioethanol dengan membran dengan skala benchscale 200 liter/hari, ataupun teknik lainnya;
 - b. desain teknis secara lengkap pabrik biodisel skala komersial 30.000 ton/tahun, pengembangan teknologi proses dan *product conformity*;
 - c. uji coba pemanfaatan minyak nabati asli (*pure plant oil, PPO*) berasal dari CPO, minyak jarak, dan minyak kelapa pada mobil dan genset;
 - d. pengembangan teknologi hidrogenasi minyak nabati untuk pembuatan *green diesel* dan *green gasoline*.
4. **Material Industri dan Material Maju** yang mencakup kegiatan litbang berbagai material, sumberdaya mineral, dan metalurgi.

Dalam bidang material industri, hasil yang diharapkan adalah penguasaan teknik pengolahan dan produk bahan-bahan galian dan pertanian primer menjadi material industri seperti pengolahan karet, polimer berbasis CPO, serta pembuatan bahan magnet, keramik industri, material komposit, pengolahan mineral, material berukuran nano (*nano materials*), dan logam-logam paduan. Keluaran kegiatan penelitian dan pengembangan dalam bidang material industri, antara lain, adalah sebagai berikut:

- a. prototip proses, produk litbang, teknoekonomi dalam pengolahan sumber daya mineral primer dan sekunder, mineral industri dan material metalurgi, manufaktur bahan logam dan teknologi hasil guna bahan;
- b. terkuasai dan termanfaatkannya teknologi maju pembuatan dan pengolahan material untuk perangkat elektronika dan telekomunikasi, membran, biodegradable polimer, teknologi laser, nano material bahan lokal, seperti nanosilica, nanosteel, komposite karet-beton, dan lainnya;
- c. terkuasainya litbang dan inovasi material berbasis sumber daya lokal bahan aktif untuk obat-obatan dan nano material, katalis dan bahan penyerap (*absorbent*) dan bahan pendispersi untuk industri pengolahan, keramik/polimer dan material lanjut untuk komponen dan bahan pendukung teknologi energi, material magnet lunak dan keras berkekuatan tinggi, material sensor dengan sensitivitas tinggi dan material komposit untuk industri otomotif.

5. **Industri, rancangbangun, dan rekayasa** mencakup kegiatan pengembangan dalam bidang industri proses, industri manufaktur, industri hankam, teknologi dan sistem transportasi, instrumentasi, teknologi produksi pertanian, serta agroindustri.

Dalam bidang ilmu-ilmu perkerajaan, hasil yang diharapkan adalah membangun kemampuan perancangan dan rekayasa di dalam negeri terutama untuk mendukung pengembangan teknologi proses pengolahan mineral, material dan metalurgi, teknologi pangan, teknologi informasi dan komunikasi, teknologi transportasi, teknologi manufaktur, serta teknologi lingkungan. Untuk itu, keluaran kegiatan litbang yang diharapkan adalah sebagai berikut:

- a. terkuasainya kemampuan pemodelan dan perkerajaan peralatan kominusi (*comminution*), konsentrasi, ekstraksi, dan pemurnian untuk pengolahan material mineral dan metalurgi;
 - b. terkuasainya perkerajaan tungku suhu tinggi untuk proses mineral, material, dan metalurgi;
 - c. terkuasainya kemampuan rekayasa dalam bidang transportasi terutama untuk menghasilkan alat transportasi yang ramah lingkungan dan memanfaatkan bahan bakar yang berasal dari energi terbarukan;
 - d. terkuasainya kemampuan rekayasa dalam bidang lingkungan terutama diarahkan untuk menghasilkan teknologi dan peralatan proses pengendalian pencemaran air, udara, suara, serta sistem dan teknologi untuk mengurangi pemanasan global.
6. **Informatika dan komunikasi** yang mencakup kegiatan litbang dalam bidang informasi dan komunikasi; elektronika dan telekomunikasi, serta informatika yang diarahkan untuk menghasilkan
- a. sistem, baik perangkat keras maupun perangkat lunak dan teknologi yang dipersiapkan untuk mendukung kemampuan industri telekomunikasi informasi dan komunikasi (TIK) untuk memenuhi kebutuhan di dalam negeri, berkompetisi dalam menghadapi berbagai persaingan, baik dalam pasar dalam negeri maupun luar negeri;
 - b. pengembangan WIMAX dan sistem komunikasi nirkable lain;
 - c. mengembang kan lebih lanjut perangkat lunak berbasis *open source*, IGOS.
7. **Ilmu kebumian dan perubahan iklim** mencakup kegiatan litbang dalam bidang geoteknologi, limnologi, inventarisasi sumberdaya alam, teknologi lingkungan, sumber daya lahan wilayah dan mitigasi bencana.

Dalam bidang ilmu kebumian, hasil yang diharapkan adalah pemahaman mendasar tentang dinamika bumi pada masa kini dan purbakala sebagai satu kesatuan sistem kebumian, serta implikasinya pada dinamika air dan iklim, dinamika dan sumber daya perairan darat, degradasi lingkungan kebumian, dan

bencana alam. Untuk itu keluaran kegiatan litbang ilmu kebumian yang diharapkan adalah sebagai berikut;

- a. terungkapnya relasi dinamika kebumian Indonesia yang terkait dengan kebencanaan geologis, lingkungan, dan iklim;
- b. terkuasainya pengetahuan, konsep, model dan tersedianya panduan teknis tentang penataan ruang wilayah berdasarkan sumber daya alam, kebencanaan serta mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.
- c. tersedianya model dan konsep manajemen sumber daya perairan darat yang dapat menjadi dasar dalam pengelolaan sumber daya air berlandaskan pendekatan ekohidrologi serta untuk mengurangi risiko bencana yang di dalamnya termasuk mitigasi dan adaptasi dengan perubahan iklim;
- d. tersedianya sistem informasi kebumian yang dapat digunakan untuk berbagai aplikasi;
- e. satu set perangkat dan media pengetahuan dan informasi untuk peningkatan kesadaran masyarakat terhadap bumi dan lingkungan menuju pengelolaan yang berkelanjutan, meningkatkan kualitas lingkungan, dan menurunkan risiko terhadap bencana kebumian;
- f. tersedianya sarana dan prasarana penelitian untuk peningkatan kualitas penelitian, pengembangan, dan inovasi.

Dalam bidang geologi bawah laut diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dinamika bumi yang terkait dengan kebencanaan, sumber daya energi, dan mineralisasi bawah laut. Keluaran yang diharapkan dari kegiatan litbang ini adalah sebagai berikut;

- a. meningkatnya pemahaman proses dinamis yang berkaitan dengan bencana geologis, seperti gempa bumi dan tsunami yang dapat menjadi dasar dalam meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana;
- b. terungkapnya dinamika cekungan yang dapat menjadi dasar dalam eksplorasi sumber daya energi bawah laut;
- c. terungkapnya mineralisasi bawah laut melalui pemahaman proses hidrothermal bawah laut.

8. **Ilmu pengetahuan sosial dan kemasyarakatan** mencakup kegiatan penelitian dalam bidang kemasyarakatan, kebudayaan; ekonomi, kependudukan, politik, dan sumberdaya regional.

Dalam bidang ilmu pengetahuan sosial dan kemasyarakatan, hasil yang diharapkan adalah terwujudnya penguasaan, pengembangan, dan penerapan iptek dalam ilmu-ilmu sosial, inovasi-ekonomi, budaya, perilaku dan kognitif, serta hukum dan politik.

Untuk itu, keluaran kegiatan litbang yang diharapkan adalah sebagai berikut:

- a. tersedianya hasil-hasil kajian untuk pengembangan ilmu pengetahuan sosial dan kebudayaan terkait dengan globalisasi segala dimensi, problematika dan segala implikasinya;
 - b. tersedianya model/pendekatan baru dalam memperkuat ketahanan nasional kemajuan ekonomi, kesejahteraan, dan kepentingan masyarakat;
 - c. dihasilkannya konsep dan rumusan kebijakan yang secara integratif dapat diaplikasikan untuk rekayasa sosial guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik;
 - d. terintegrasikannya pendekatan penciptaan nilai dari iptek ke dalam kebijakan pembangunan wilayah melalui sirkulasi pengetahuan, layanan jasa, dan konsentrasi tematik iptek dalam kawasan tertentu;
 - e. tersusunnya konsep dan rancangan pembangunan kebijakan iptek nasional yang tepat;
 - f. terbentuknya kelompok peneliti yang andal dan profesional dalam bidang manajemen iptek untuk mendukung litbang pemerintah yang efektif dan efisien serta kelompok masyarakat yang sadar iptek.
9. **Litbang ketenaganukliran dan pengawasan** mencakup penelitian dan pengembangan dalam bidang energi dan nonenergi. Bidang energi mencakup litbang bahan galian nuklir, elemen bahan bakar nuklir, reaktor nuklir, serta penanggulangan limbah nuklir. Bidang nonenergi mencakup litbang aplikasi isotop dan radiasi untuk bidang pertanian, industri, dan kesehatan.

Keluaran kegiatan litbang nuklir dalam bidang energi diarahkan untuk.

- a. persiapan pembangunan PLTN pertama di Indonesia, yang antara lain mencakup persiapan tapak dan lingkungan, studi kelayakan, penyusunan detail desain, serta evaluasi teknis dan ekonomi;
- b. penyusunan data teknis potensi Th dan uranium di Indonesia, paket teknologi pengolahan bijih uranium, paket teknologi bahan bakar nuklir, studi kelayakan konversi bahan bakar nuklir, paket teknologi pengelolaan limbah radioaktif dan prarancangan instalasi pengolah limbah cair padat yang dihasilkan dari operasi PLTN;
- c. penyelesaian desain konseptual reaktor riset inovatif; desain konseptual teras, sistem konversi dan sistem keselamatan reaktor daya maju kogenerasi serta evaluasi teknologi dan keselamatan teras, serta sistem keselamatan dan keandalan reaktor daya PWR.

Sementara itu, keluaran kegiatan litbang nuklir dan radio isotop dalam bidang non energi diarahkan antara lain, untuk

- a. mendukung ketahanan pangan dengan target menghasilkan (1) beberapa varietas unggul tanaman pangan (padi dan kedelai) yang memiliki spesifikasi genjah (padi < 100 hari dan kedelai < 80 hari), produktivitas tinggi (padi >10 ton/ha GKP dan kedelai > 4 ton/ha), tahan hama dan

memiliki nilai vitamin/gizi yang tinggi; (2) sarana produksi pertanian yang berupa pupuk hayati dan pestisida alami, desain detail iradiator gamma untuk iradiasi produk pascapanen dan teknologi iradiasi untuk pengawetan makanan siap saji; (3) vaksin untuk kesehatan dan pencegahan penyakit ternak ruminansia, layanan teknologi Kit RIA untuk penentuan kadar hormon progesteron dan formula suplemen pakan ternak multnutrisi berbasis bahan lokal; serta (4) model pertanian dan peternakan terpadu berbasis iptek nuklir;

- b. mendukung penyediaan teknologi untuk kesehatan dengan target menghasilkan (1) bahan vaksin malaria dan teknologi deteksi dini *new emerging deseases (flu burung dan flu babi)*; (2) paket teknologi penatalaksanaan kanker payudara, dan serviks, dokumen teknis metode pembuatan kandidat bahan vaksin malaria tropika (*plasmodium falciparum*) iradiasi stadium eritrositik, prototipe sistem carbone *monitoring* radiasi, metode standardisasi dan kalibrasi radiasi, peta radioaktivitas lingkungan dan laboratorium metrologi radiasi; (3) biomaterial bahan pengganti untuk keperluan pascaoperasi (tulang, gigi, mata, dll); (4) serta perangkat *Brachyterapy Medium Doserate* untuk kanker serviks, prototipe pesawat sinar X fluoroscopy dan prototipe pesawat *sinar-x Mamography*;
- c. membuat prototipe mesin berkas elektron (MBE) untuk industri berbasis lateks karet alam dan dokumen teknis rancangan detail siklotron 13 MeV untuk pembuatan radiofarmaka dan pengembangan obat;

Sementara itu, dalam bidang pengawasan pemanfaatan tenaga nuklir, kegiatan yang akan dilakukan mencakup penyelenggaraan perizinan dan inspeksi dengan tujuan memenuhi dan memelihara tingkat keselamatan, kemananan, dan ketenteraman pekerja, masyarakat dan lingkungan sesuai dengan standar yang berlaku. Dalam rangka persiapan pengawasan pembangunan dan pengoperasian pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN), akan disusun seluruh perangkat peraturan terkait PLTN, membangun sistem perizinan dan inspeksi pada tahap penentuan tapak, konstruksi dan operasi PLTN, serta mengembangkan sistem kesiapsiagaan dan kedarutan nuklir yang didukung oleh pengkajian secara komprehensif.

10. **Litbang penerbangan dan antariksa** mencakup penelitian dan pengembangan roket, satelit, penginderaan jauh, atmosfer, dan antariksa.

Keluaran kegiatan litbang roket meliputi bahan bakar roket, konstruksi dan alat kendali roket serta *tracking system*, penerapan roket-roket untuk keperluan sipil. Litbang satelit mencakup sistem bus satelit, sistem muatan satelit dan sistem stasiun bumi pengendali, teknologi propulsi, kendali, dan aerostuktur. Litbang penginderaan jauh untuk pengembangan sensor penginderaan jauh, penerimaan dan pemanfaatan citra satelit untuk mendukung litbang kebumihan, pemantauan kondisi lingkungan, perubahan iklim global, mitigasi bencana, aplikasi pesisir



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

dan laut, pertanian dan kehutanan, pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan wilayah. Sementara itu dalam bidang atmosfer dan antariksa mencakup penelitian interaksi matahari-bumi, deteksi aktivitas matahari dan dampaknya bagi komunikasi dan navigasi, deteksi perubahan fenomena lingkungan antariksa, deteksi sampah antariksa dan benda jatuh antariksa, dinamika dan variabilitas interaksi atmosfer-ionosfer, deteksi variabilitas dinamika atmosfer -gas rumah kaca, polusi udara dan ozon, dan pengaruhnya terhadap perubahan iklim global dan klimatologi dan sebagainya.

**RENCANA TINDAK PRORITAS BIDANG
ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI**

**BIDANG PEMBANGUNAN: ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI
PRIORITAS BIDANG: SISTEM INOVASI NASIONAL**

NO	FOKUS PRIORITAS /KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil Outcomes/Output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
1	Penataan kelembagaan Iptek	Terbangunnya tatakelola litbang yang efisien dan efektif, yang mampu mendorong kreatifitas dan profesionalisme peneliti, serta meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya iptek						98,3
a.	Penguatan Kompetensi Lembaga Litbang	Berkembangnya pusat-pusat unggulan iptek	Jumlah pusat-pusat unggulan iptek	1	1	Peningkatan Kemampuan Iptek untuk Penguatan Sistem Inovasi Nasional (SIN)	KRT	5,0
b.	Pengembangan Budaya Iptek	Terbangunnya kawasan percontohan pengembangan budaya masyarakat yang kreatif dan inovatif	Jumlah kawasan percontohan	1	1	Peningkatan Kemampuan Iptek untuk Penguatan SIN	KRT	5,0

BIDANG PEMBANGUNAN: ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI
PRIORITAS BIDANG: SISTEM INOVASI NASIONAL

NO	FOKUS PRIORITAS /KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil Outcomes/Output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
c.	Perencanaan, Penganggaran, Verifikasi dan Perbendaharaan Penataan, Pengembangan Organisasi dan SDM	Terbangunnya tatakelola litbang yang efisien dan efektif, yang mampu mendorong kreatifitas dan profesionalisme peneliti	Paket sistem pengelolaan keuangan, perencanaan dan penganggaran,	3	3	Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya	LIPI	45,7
			Paket kebijakan reformasi birokrasi	1	1			
			Paket sistem seleksi proposal kompetitif	1	1			
d.	Pengkajian dan Penerapan Audit Teknologi (PN11)	Termanfaatkannya Audit Teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas litbang	Paket rekomedasi, advokasi, survei dan konsultasi mengenai audit teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas litbang	3	3	Pengkajian dan Penerapan Teknologi	BPPT	26,0
e.	Pelaksanaan Standardisasi Iptek Nuklir	Diperolehnya Standardisasi, akreditasi dan sertifikasi serta jaminan mutu Iptek Nuklir	Usulan SNI bidang nuklir	3	3	Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya	BATAN	6,6
			Jumlah Standar BATAN (SB)	1	2			
			% akreditasi laboratorium BATAN	40	100			
			% sertifikasi sistem mutu	50	100			

BIDANG PEMBANGUNAN: ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI
PRIORITAS BIDANG: SISTEM INOVASI NASIONAL

NO	FOKUS PRIORITAS /KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil Outcomes/Output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
f..	Pengundangan Undang-Undang Tentang Keantariksaan	UU Keantariksaan Nasional dan PP turunannya	Sinkronisasi dan harmonisasi RUU Keantariksaan Nasional			Dukungan manajemen dan teknis lainnya	LAPAN	10,0
			UU Keantariksaan Nasional					
			RPP terkait UU Keantariksaan Nasional dan sinkronisasi / harmonisasi					
			PP terkait UU Keantariksaan Nasional dan turunannya		1			
2	Penguatan Sumberdaya Iptek	Terbangunnya pusat-pusat keunggulan pengetahuan						745,48

BIDANG PEMBANGUNAN: ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI
PRIORITAS BIDANG: SISTEM INOVASI NASIONAL

NO	FOKUS PRIORITAS /KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil Outcomes/Output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
a.	Peningkatan kapasitas SDM iptek (PN11)	Meningkatnya kapasitas SDM iptek	Jumlah karyasiswa	S2 = 50, S3 = 10	S2 = 50, S3 = 25	Peningkatan Kemampuan Iptek untuk Penguatan SIN	KRT	250,0
b.	Fasilitasi Proses Perolehan Hak Paten dan Kepemilikan HKI Produk Teknologi dan Produk Kreatif (PN11)	Kebijakan untuk fasilitasi proses perolehan hak paten dan kepemilikan HKI produk teknologi dan produk kreatif	Jumlah kebijakan	1	1	Peningkatan Kemampuan Iptek untuk Penguatan SIN	KRT	10,0
	Pelaksanaan Insentif Perolehan Paten dan Kepemilikan HKI (PN11)	Terlaksananya insentif perolehan paten dan kepemilikan HKI	Jumlah usulan paten dan kepemilikan HKI yang difasilitasi	10	10			
c.	Penyelenggaraan Pendidikan Teknologi Nuklir	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pendidikan teknologi nuklir	Jumlah lulusan	120	75	Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya	BATAN	20,0
			Jumlah makalah nasional	15	25			
			Jumlah makalah internasional	3	5			

BIDANG PEMBANGUNAN: ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI
PRIORITAS BIDANG: SISTEM INOVASI NASIONAL

NO	FOKUS PRIORITAS /KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil Outcomes/Output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
d.	Peningkatan dan Pembangunan Laboratorium BPPT Terpadu	Termafaatkannya laboratorium BPPT terpadu untuk mendukung sistem inovasi nasional dan P3IPTEK	Laboratorium dari Klaster I s/d VI untuk : Transportasi & Produksi, Material, Proses & Konstruksi, Hankam & ICT, GeosTech, Energi serta Fasilitas lain	1	1	Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur BPPT	BPPT	360,0
e.	Penataan, Pengembangan Organisasi dan SDM	Peneliti yang mengikuti pendidikan S2 dan S3	Jumlah Peneliti S2 (Kumulatif)	10	20	Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya	LIPI	17,0
			Jumlah peneliti S3 (Kumulatif)	2	5			
f.	Pembinaan, Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan Peneliti	Terbangunnya sumberdaya yang kompeten dan memenuhi kebutuhan dalam perkembangan Iptek;	Angkatan diklat	24	25	Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya	LIPI	21,0
			Paket Peraturan/kajian Peneliti	1	1			
g.	Penatausahaan, pengadaan, pemeliharaan sarana dan prasarana	Meningkatnya kualitas fasilitas-fasilitas riset yang ada	paket Rehabilitasi infrastruktur sarana dan prasarana Gatot Subroto	1		Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya	LIPI	47,5
			paket Rehabilitasi infrastruktur sarana dan prasarana LIPI, termasuk jaringan internet		1			

BIDANG PEMBANGUNAN: ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI
PRIORITAS BIDANG: SISTEM INOVASI NASIONAL

NO	FOKUS PRIORITAS /KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil Outcomes/Output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
h.	Pengembangan Sistem Dokumentasi dan Informasi Ilmiah	Terbangunnya pusat penelitian maju dan interdisipliner bertaraf internasional	Inisiasi LIPI International Center for Interdisciplinary and Advanced Research (ICIAR) International training-workshops, penelitian pasca sarjana tematis internasional, twinning institution	1	1	Program penelitian, penguasaan, dan pemanfaatan iptek	LIPI	15,0
i.	Peningkatan sarana dan prasarana litbang	Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana litbang yang memadai	Jumlah lab yang telah direvitalisasi	1	1	Peningkatan Kemampuan Iptek untuk Penguatan SIN	KRT	5,0
3	Penataan Jaringan Iptek	Terbangunnya keterkaitan antar lembaga litbang, antar lemlit dengan perguruan tinggi, dan antara lemlit dengan industri dan masyarakat pengguna.						1.265,0

BIDANG PEMBANGUNAN: ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI
PRIORITAS BIDANG: SISTEM INOVASI NASIONAL

NO	FOKUS PRIORITAS /KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil Outcomes/Output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
a.	Penguatan Kebijakan Iptek dan Dukungan Litbang Ketahanan Pangan (PN5)	Kebijakan peningkatan dukungan litbang untuk ketahanan pangan khususnya pengembangan pupuk ekologis dan benih unggul-adaptif terhadap lingkungan sub-optimal, teknologi panen, teknologi pengelolaan lahan marginal untuk produksi pangan.	Jumlah kebijakan	3	3	Peningkatan Kemampuan Iptek untuk Penguatan SIN	KRT	50,0
			Jumlah riset bersama	4	4			
b.	Dukungan iptek untuk penciptaan dan pemanfaatan sumber energi baru dan terbarukan (PN8)	Kebijakan peningkatan dukungan iptek untuk penciptaan dan pemanfaatan sumber energi baru dan terbarukan, termasuk koordinasi kebijakan untuk persiapan pembangunan PLTN	Jumlah kebijakan	1	1	Peningkatan Kemampuan Iptek untuk Penguatan SIN	KRT	25,0
			Jumlah riset bersama	2	2			
			Paket Koordinasi		1			50,0
c.	Penguatan Kebijakan Iptek dan Dukungan litbang untuk penurunan emisi gas CO2 dan adaptasi perubahan iklim (PN9)	Kebijakan peningkatan dukungan litbang untuk penurunan emisi gas CO2 dan adaptasi perubahan iklim	Jumlah kebijakan			Peningkatan Kemampuan Iptek untuk Penguatan SIN	KRT	49,0
			Jumlah riset bersama	5	5			

BIDANG PEMBANGUNAN: ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI
PRIORITAS BIDANG: SISTEM INOVASI NASIONAL

NO	FOKUS PRIORITAS /KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil Outcomes/Output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
d.	Pendayagunaan Teknologi dan Pengembangan Kapasitas Iptek untuk Mitigasi Bencana (PN9)	Kebijakan pendayagunaan teknologi mitigasi bencana	Jumlah kebijakan	1	1	Peningkatan Kemampuan Iptek untuk Penguatan SIN	KRT	49,0
		Tersusunnya Standard Operation Procedure (SOP) Peningkatan kapasitas respons aparaturn pemerintah dalam peringatan dini dan penanganan bencana	Jumlah SOP		1			
e.	Dukungan Pengembangan dan Pendayagunaan Teknologi Pendukung Pembangunan Daerah Tertinggal, Terdepan dan Pasca Konflik serta Penyelesaian Pemetaan Wilayah Perbatasan RI (PN10)	Kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pengembangan dan pendayagunaan teknologi pendukung pembangunan daerah tertinggal, terdepan dan pasca konflik, penyelesaian pemetaan wilayah perbatasan RI dengan Malaysia, Papua Nugini, Timor Leste, dan Filipina	Jumlah kebijakan	1	1	Peningkatan Kemampuan Iptek untuk Penguatan SIN	KRT	5,0
			Jumlah pilot pendukung teknologi untuk pembangunan daerah tertinggal	1	1			
f.	Peningkatan kemampuan inovasi dan kreativitas pemuda (PN11)	Kebijakan peningkatan kemampuan inovasi dan kreativitas pemuda	Jumlah kebijakan	1	1	Peningkatan Kemampuan Iptek untuk Penguatan SIN	KRT	15,0
			Jumlah pilot peningkatan inovasi dan kreativitas pemuda	4	4			

BIDANG PEMBANGUNAN: ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI
PRIORITAS BIDANG: SISTEM INOVASI NASIONAL

NO	FOKUS PRIORITAS /KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil Outcomes/Output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
g.	Pelaksanaan Insentif Riset Dasar dan Terapan (PN11)	Terlaksananya insentif riset dasar dan terapan	Jumlah paket riset dasar	44	35	Peningkatan Kemampuan Iptek untuk Penguatan SIN	KRT	150,0
			Jumlah paket riset terapan	78	60			
h.	Pelaksanaan Insentif Difusi Iptek (PN11)	Terlaksananya insentif difusi iptek	Jumlah paket	92	75	Peningkatan Kemampuan Iptek untuk Penguatan SIN	KRT	125,0
i.	Pelaksanaan insentif peningkatan kapasitas iptek sistem produksi (PN11)	Terlaksananya insentif peningkatan kapasitas iptek sistem produksi	Jumlah paket insentif	130	100	Peningkatan Kemampuan Iptek untuk Penguatan SIN	KRT	200,0
j.	Peningkatan dukungan teknologi bagi pemberdayaan industri strategis bidang pertahanan (PNL 1)	Kebijakan dukungan teknologi untuk revitalisasi industri pertahanan	Jumlah kebijakan	1	1	Peningkatan Kemampuan Iptek untuk Penguatan SIN	KRT	25,0
			Jumlah kegiatan bersama hasil koordinasi dan sinkronisasi	1	1			

BIDANG PEMBANGUNAN: ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI
PRIORITAS BIDANG: SISTEM INOVASI NASIONAL

NO	FOKUS PRIORITAS /KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil Outcomes/Output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
l.	Pengkajian dan Penerapan Inkubasi Teknologi (PN11)	Termanfaatkannya inkubasi teknologi untuk terbangunnya sinergi antara lembaga litbangyasa, industri dan pemerintah	Paket rekomendasi, advokasi, sruvei dan konsultasi mengenai inkubasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas litbang dan terbangunnya sinergi antara lembaga litbangyasa, industri dan pemerintah	3	3	Pengkajian dan Penerapan Teknologi	BPPT	65,4
m.	Pengembangan Pranata Inovasi (PN11)	Drafting paten dan pendaftaran HKI atas produk inovasi teknologi (tidak terkena daftar merah kepabeanan)	Pendaftaran HKI	20	27	Program penelitian, penguasaan, dan pemanfaatan iptek	LIPI	8,2
		Kapitalisasi dan pemanfaatan paten serta invensi LIPI yang selama ini selama ini menjadi produk bernilai ekonomi yang bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat	Paket teknologi/HKI	3	4	Program penelitian, penguasaan, dan pemanfaatan iptek	LIPI	8,7

BIDANG PEMBANGUNAN: ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI
PRIORITAS BIDANG: SISTEM INOVASI NASIONAL

NO	FOKUS PRIORITAS /KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil Outcomes/Output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
n.	Peningkatan Efektivitas Riset secara sinergi antara Perguruan Tinggi dgn Lembaga Litbang	Kebijakan peningkatan efektivitas riset secara sinergi antara perguruan tinggi dengan lembaga riset	Jumlah kebijakan	1	1	Peningkatan Kemampuan Iptek untuk Penguatan SIN	KRT	5,0
o.	Pengembangan jaringan kerjasama penelitian internasional	Meningkatnya jaringan kerjasama penelitian internasional	Jumlah kerjasama penelitian internasional	8	8	Peningkatan Kemampuan Iptek untuk Penguatan SIN	KRT	10,0
p.	Peningkatan promosi dan diseminasi iptek	Terlaksananya diseminasi iptek	Jumlah paket	10	10	Peningkatan Kemampuan Iptek untuk Penguatan SIN	KRT	50,0
q.	Peningkatan Pemanfaatan dan Pengembangan Perangkat Lunak Berbasis Open Source	Meningkatnya pemanfaatan perangkat lunak berbasis open source	Jumlah standardisasi	1	1	Peningkatan Kemampuan Iptek untuk Penguatan SIN	KRT	25,0
			Jumlah pilot implementasi interoperabilitas teknologi informasi dan komunikasi	5	5			
r.	Pengembangan Jaringan Kerjasama Penelitian dan Pemasarakatan Iptek	Meningkatnya kerjasama antar lembaga litbang dan antara lemlit dengan perguruan tinggi	Jejaring terbangun terkait focal point nasional	7	10	Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya	LIPI	14,0
			Paket kerjasama	1	1			

BIDANG PEMBANGUNAN: ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI
PRIORITAS BIDANG: SISTEM INOVASI NASIONAL

NO	FOKUS PRIORITAS /KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil Outcomes/Output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
s.	Pengembangan Sistem Dokumentasi dan Informasi Ilmiah	Terbangunnya teknopolis yang melibatkan kluster-kluster pengetahuan, pengembangan kawasan dan pelayanan jasa	dokumen Kajian substansi Teknopolis (master plan fisik)	1		Program penelitian, penguasaan, dan pemanfaatan iptek	LIPI	34,5
			paket sarana dan prasarana kawasan teknopolis					
			kajian/publikasi iptek,		3			
			paket portal pengetahuan dan bibliotainment		1			
			Database journal ilmiah		1			
	Pengembangan Inovasi	Tumbuhnya wirausahaan baru yang berbasis inovasi teknologi	Unit usaha UMKM inovatif baru	2	3			
teknologi/HKI LIPI yang diinkubasi			2	4				
tenant			1	2				
t.	Penelitian dan Pengembangan KIM; Penelitian dan Penguatan Sistem Mutu dan Teknologi Pengujian	Terbangunnya infrastruktur system pengukuran (metrology), pengujian dan perangkat kalibrasi nasional	Lab terakreditasi,	2	2	Program penelitian, penguasaan, dan pemanfaatan iptek	LIPI	20,0
			Sistem dan metoda uji	8	8			
			Prototip	5	5			
			Paket interlaboratory comparison	5	5			
			Publikasi ilmiah	40	40			
			Paket aplikasi e-commerce		1			

BIDANG PEMBANGUNAN: ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI
PRIORITAS BIDANG: SISTEM INOVASI NASIONAL

NO	FOKUS PRIORITAS /KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil Outcomes/Output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
u.	Kerjasama Pemanfaatan Iptek	Aplikasi dan diseminasi Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk peningkatan produktivitas usaha berbasis teknologi di daerah	Wilayah aplikasi TTG	5	5	Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya	LIPI	82,0
			Jumlah UKM terbina	40	40			
v.	Pengembangan Jaringan Kerjasama Penelitian dan Pemasyarakatan Iptek	Meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya iptek	Kegiatan sosialisasi	10	10	Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya	LIPI	10,8
			Kegiatan pembinaan	12	12			
			Kegiatan temu ilmiah	2	2			
w.	Peningkatan Kemitraan Teknologi Nuklir	Diperolehnya mitra komersial yang memanfaatkan hasil litbang iptek nuklir	Jumlah hasil litbang yang dikomersialisasikan	2	2	Penelitian Pengembangan dan Penerapan Energi Nuklir, Isotop dan Radiasi	BATAN	9,6
			Jumlah mitra komersial	3	3			
x.	Peningkatan Kemandirian daya Saing Industri dan UMKM Berbasis Teknologi	Terbangunnya keterkaitan antar lembaga litbang, antar lemlit dengan perguruan tinggi, dan antara lemlit dengan industri dan masyarakat pengguna.	Terlaksanakanya pelayanan teknologi berupa rekomendasi, alih teknologi, survei, konsultasi dan advokasi pada bidang kebijakan teknologi (paket)	1	1	Dukungan manajemen dan teknis lainnya	BPPT	18,4

BIDANG PEMBANGUNAN: ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI
PRIORITAS BIDANG: SISTEM INOVASI NASIONAL

NO	FOKUS PRIORITAS /KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil Outcomes/Output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
y.	Pengkajian dan Penerapan Kebijakan Teknologi	Termanfaatkannya kebijakan inovasi teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas litbang	Paket rekomendasi, advokasi, survei dan konsultasi kebijakan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas litbang	1	1	Pengkajian dan Penerapan Teknologi	BPPT	15,2
z.	Pengembangan Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian	Tersedianya peraturan perundang-undangan di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian	Draft RUU Standardisasi	1		Pengembangan Standardisasi Nasional	BSN	11,3
			UU Standardisasi					
			PP Standardisasi					
			Laporan sosialisasi UU dan PP Standardisasi		1			
aa.	Perumusan Standar	Meningkatnya jumlah Standar Nasional Indonesia (SNI) yang ditetapkan sesuai kebutuhan pasar dan tata cara perumusan standar	SNI	200	200	Pengembangan Standardisasi Nasional	BSN	24,2

BIDANG PEMBANGUNAN: ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI
PRIORITAS BIDANG: SISTEM INOVASI NASIONAL

NO	FOKUS PRIORITAS /KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil Outcomes/Output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
ab.	Peningkatan Penerapan Standar	Meningkatnya penerapan standar/SNI oleh pemangku kepentingan standarisasi	Laporan fasilitasi penerapan SNI kepada LPK dan industri/ organisasi	1	1	Pengembangan Standarisasi Nasional	BSN	55,0
ac.	Pendidikan dan Pemasyarakatan Standarisasi	Meningkatnya persepsi dan partisipasi pemangku kepentingan dalam kegiatan standarisasi	Laporan promosi dan diklat standardi-sasi	1	1	Pengembangan Standarisasi Nasional	BSN	54,8
TOTAL								2.108,8

**RENCANA TINDAK PRORITAS BIDANG
ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI**

BIDANG PEMBANGUNAN: ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI

PRIORITAS BIDANG: PENGUASAAN, PENGEMBANGAN, DAN PENERAPAN IPTEK (P3-IPTEK)

NO	FOKUS PRIORITAS /KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil Outcomes/Output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN / LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
1	Biologi Molekuler, Bioteknologi dan Kedokteran							283,8
a.	Pengembangan Teknologi Pembenihan Ikan Nila Unggul	Termanfaatkannya teknologi produksi benih unggul ikan nila untuk mendukung ketahanan pangan	Prototipe Rekomendasi dan alih teknologi Kajian ikan Prototipe ikan Rekomendasi dan alih teknologi	1	1	Program Pengkajian dan Penerapan Teknologi	BPPT	6,0
b.	Pengolahan Teknologi Pengolahan Hasil Perikanan dan Peternakan;	Termanfaatkannya teknologi pengolahan hasil ikan dan ternak untuk mendukung ketahanan pangan	Sejumlah rekomendasi, alih teknologi, prototipe, pengujian pada pengolahan hasil ikan dan ternak (paket prototype)	4	2	Program Pengkajian dan Penerapan Teknologi	BPPT	6,8
c.	Bioremediasi Lahan Pertanian di Pulau Jawa	Termanfaatkannya teknologi bioremediasi lahan pertanian untuk mendukung ketahanan pangan	Kajian Bioremediasi Lahan Pertanian di Pulau Jawa Proto tipe, pengujian Bioremediasi Lahan Pertanian di Pulau Jawa Rekomendasi dan Alih teknologi Bioremediasi Lahan Pertanian di Pulau Jawa		3	Program Pengkajian dan Penerapan Teknologi	BPPT	6,5
d.	Teknologi hyperspectral untuk pemetaan sentra produksi pertanian	Termanfaatkannya Teknologi hyperspectral untuk pemetaan sentra produksi pertanian untuk mendukung ketahanan pangan	Rekomendasi mengenai sentra-sentra produksi pertanian	1	1	Program Pengkajian dan Penerapan Teknologi	BPPT	5,0

BIDANG PEMBANGUNAN: ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI

PRIORITAS BIDANG: PENGUASAAN, PENGEMBANGAN, DAN PENERAPAN IPTEK (P3-IPTEK)

NO	FOKUS PRIORITAS /KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil Outcomes/Output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN / LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
e.	Litbang Benih Unggul Berbasis Biologi Molekuler (PN5)	Benih unggul berbasis biologi molekuler	Jumlah varietas Benih unggul	1	4	Program Penelitian, Penguasaan, Dan Pemanfaatan iptek	LIPI	45,0
	Litbang pupuk organik dari mikroba hayati Indonesia (PN5)	Pupuk organik dari mikroba hayati Indonesia	percontohan produksi pupuk organik di tk pedesaan aplikasi pupuk organik pada paket <i>biovillage</i>	1	10			
	Litbang keanekaragaman pangan (PN5)	Keaneka-ragaman pangan	Jumlah varietas	2	2			
f.	Penelitian Bioteknologi Peternakan Modern (PN5)	Terbangunnya fasilitas litbang bioteknologi peternakan modern	Fasilitas Laboratorium dan peralatannya	2		Program Penelitian, Penguasaan, Dan Pemanfaatan iptek	LIPI	25,0
			Paket pengembangan program biotek peternakan		1			
g.	Penelitian Bioteknologi	Meningkatnya penguasaan dan pemanfaatan biologi molekuler dan bioteknologi Pengembangan Bioresource Centre dan Microbial Culture Collection	Publikasi ilmiah nasional	4	4	Program Penelitian, Penguasaan, Dan Pemanfaatan iptek	LIPI	17,0
			Publikasi ilmiah internasional	1	1			
			Pembenahan koleksi mikroba rujukan, bank biji, bank DNA, tissue culture, dan bank extract,	1				
			Master plan fasilitas koleksi					
			Penambahan koleksi, data base, sistem pengelolaan bestandart nasional		1000			
h.	Penelitian Molecular Farming dan Bahan Baku Obat	Pengembangan bahan obat berbasis bahan alam dan biologi molekuler	Jenis bahan obat	3	3	Program Penelitian, Penguasaan, Dan Pemanfaatan iptek	LIPI	26,0

BIDANG PEMBANGUNAN: ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI

PRIORITAS BIDANG: PENGUASAAN, PENGEMBANGAN, DAN PENERAPAN IPTEK (P3-IPTEK)

NO	FOKUS PRIORITAS /KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil Outcomes/Output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN / LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
i.	Pengkajian dan Penerapan Teknologi Produksi Obat Generik dan Obat Herbal	Termanfaatkannya teknologi farmasi dan medika untuk kesehatan.	rekomendasi, prototipe, bibit unggul Rekomendasi alih teknologi dan pengujian untuk teknologi farmasi dan medika Prototipe produk bahan farmasi (probiotik) Rekomendasi alat medis	1	1	Program Pengkajian dan Penerapan Teknologi	BPPT	25,5
j.	Peningkatan litbang iptek unggulan di bidang kesehatan, obat-obatan dan instrumentasi medis (PN11)	Meningkatnya litbang iptek unggulan di bidang kesehatan, obat-obatan dan instrumentasi medis	Jumlah paket penelitian	5	5	Program Penguatan SIN	KRT	100,0
2	Ilmu Pengetahuan Alam							366,9
a.	Pengembangan Pupuk Berimbang (PN 5 - Litbang)	Termanfaatkannya teknologi pupuk berimbang untuk mendukung ketahanan pangan	Survei, pilot plant Pilot project, peng- ujian Pilot plant, biofer- tilizer Pengujian, alih tekn Rekomendasi	1	1	Program Pengkajian dan Penerapan Teknologi	BPPT	79,0
b.	Pengembangan Konservasi Tumbuhan Indonesia (Kebun Raya Bogor; Pengembangan Konservasi Kebun Raya Cibodas; Pengembangan Konservasi Kebun Raya Purwodadi; Pengembangan Konservasi Kebun Raya Bali	Terlaksananya fungsi kebun raya sebagai tempat konservasi eksitu	Paket Laporan O&M kebun raya LIPI	4	4	Program Penelitian, Penguasaan, Dan Pemanfaatan iptek	LIPI	25,0

BIDANG PEMBANGUNAN: ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI

PRIORITAS BIDANG: PENGUASAAN, PENGEMBANGAN, DAN PENERAPAN IPTEK (P3-IPTEK)

NO	FOKUS PRIORITAS /KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil Outcomes/Output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN / LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
c.	Pengembangan Konservasi Tumbuhan Indonesia - Kebun Raya Bogor (PN9)	Konservasi ex-situ dalam bentuk kebun raya daerah	Kebun raya (paket kawasan)	2	4	Program Penelitian, Penguasaan, Dan Pemanfaatan iptek	LIPI	25,0
d.	Penelitian Biologi	Informasi mikroorganisme dalam habitat alam dan dinamikanya, serta Pemanfaatan genetik mikroorganisme untuk mendegradasi polutan, dan Terbangunnya infrastruktur pengamanan plasma nutfah Terkelolanya koleksi spesimen flora dan fauna hidup maupun awetan	Publikasi ilmiah isolat mikroba prototipe paket teknologi paten plasma nutfah Penambahan koleksi rujukan flora dan fauna, data base, sistem pengelolaan berstandart internasional (spesimen) paket fasilitas depositori	10 10 2 1 10 30.000 2	10 10 2 1 10 30.000 2	Program Penelitian, Penguasaan, Dan Pemanfaatan iptek Program Penelitian, Penguasaan, Dan Pemanfaatan iptek	LIPI LIPI	20,5 31,5

BIDANG PEMBANGUNAN: ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI

PRIORITAS BIDANG: PENGUASAAN, PENGEMBANGAN, DAN PENERAPAN IPTEK (P3-IPTEK)

NO	FOKUS PRIORITAS /KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil Outcomes/Output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN / LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
e.	Pengembangan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan Tsunami Buoy dalam Program Nasional InaTEWS	Termanfaatkannya teknologi survei kelautan untuk lingkungan hidup dan pengelolaan bencana, ketahanan pangan, infrastruktur dan energi kelautan.	Terlaksananya pemeliharaan, pemanfaatan dan pengembangan Pilot Plant Tsunami Buoy dalam program nasional InaTEWS (Jumlah buoy)	9	17	Program Pengkajian dan Penerapan Teknologi	BPPT	36,5
f.	Penelitian Oceanografi	Data potensi bahan obat dari makro algae dan sponge; biota laut di ekosistem terumbu karang; abalon, dan rajungan; serta sistem informasi oseanografi.	Publikasi makalah Prototipe Konsep	37 7 6	58 10 8	Program Penelitian, Penguasaan, Dan Pemanfaatan iptek	LIPI	62,0
g.	Penelitian Oceanografi (PN9)	Panduan dan sosialisasi kesiapsiagaan masyarakat pesisir	paket	2	2	Program Penelitian, Penguasaan, Dan Pemanfaatan iptek	LIPI	17,0
		Pengembangan Sistem Informasi dan penelitian Kerusakan terumbu karang	Paket informasi dasar	3	3	Program Penelitian, Penguasaan, Dan Pemanfaatan iptek	LIPI	70,4

BIDANG PEMBANGUNAN: ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI

PRIORITAS BIDANG: PENGUASAAN, PENGEMBANGAN, DAN PENERAPAN IPTEK (P3-IPTEK)

NO	FOKUS PRIORITAS /KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil Outcomes/Output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN / LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
3	Energi Baru Dan Terbarukan							355,3
a.	Pengembangan PLTP Skala Kecil (PN 8)	Termanfaatkannya sistem teknologi pembangkit listrik skala kecil, aplikasi teknologi kualitas daya sistem energi, serta penerapan teknologi dan sistem konservasi energi pada peralatan dan pemanfaatan energi kandungan komponen dalam negeri semaksimal mungkin	Jumlah prototype, alih teknologi sistem dan komponen Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi/PLTP (alih teknologi 2 MW)	1	2	Program Pengkajian dan Penerapan Teknologi	BPPT	177,0
b.	Teknologi Efisiensi Pemanfaatan Sumberdaya Air (PN 10)	Termanfaatkannya teknologi efisiensi pemanfaatan sumberdaya air di daerah tertinggal	Rekomendasi dan pilot plant untuk pemanfaatan sumberdaya air	1	1	Program Pengkajian dan Penerapan Teknologi	BPPT	6,3
c.	Pengkajian dan Penerapan Teknologi Energi Bersih	Termanfaatkannya sistem teknologi pembangkit listrik skala kecil, aplikasi teknologi kualitas daya sistem energi, serta penerapan teknologi dan sistem konservasi energi pada peralatan dan pemanfaatan energi kandungan komponen dalam negeri semaksimal mungkin	alih tekno-logi 2 MW alih tekno- logi PLTP Conden- sing %MW alih teknologi, pilot plant binarycycle 100kw alih teknologi, binarycycle 1 MW pilot plant binary cycle 1 Mw dan sertifikasi Jumlah HAKI, prototipe, rekomendasi, pilot plant, paper, Studi Kelayakan, hasil pengujian, dan PNBP teknologi Gasifikasi Batubara/ Biomasa	1 1 kajian	 1 1 FS	Program Pengkajian dan Penerapan Teknologi	BPPT	23,0 22,5

BIDANG PEMBANGUNAN: ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI

PRIORITAS BIDANG: PENGUASAAN, PENGEMBANGAN, DAN PENERAPAN IPTEK (P3-IPTEK)

NO	FOKUS PRIORITAS /KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil Outcomes/Output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN / LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
			Jumlah kajian desain & aplikasi, prototyping, studi kelayakan, rekomendasi kebijakan dan pelaksanaan, dan intermediasi teknologi energi terbarukan, energy fosil dan efisiensi energy (paket)	2	5			31,0
d.	Pemanfaatan Dimethyl Ether (DME) sebagai bahan bakar rumah tangga	Termanfaatannya DME pada pengembangan energi alternatif	rekomendasi pada DME untuk alternatif energi pilot project pada DME untuk alternatif energi	1	1 1	Program Pengkajian dan Penerapan Teknologi	BPPT	10,5
e.	Pengembangan listrik tenaga surya	Termanfaatannya listrik tenaga surya	rekomendasi dan pilot plant	1	1	Program Pengkajian dan Penerapan Teknologi	BPPT	9,0
f.	Penelitian Konversi Energi (PN 8)	Demo <i>pilot plant bio-gasoline</i> dari ligno selulosa Standardisasi teknologi pengujian konversi energi	paket paket	1 1	1 1	Program Penelitian, Penguasaan, Dan Pemanfaatan iptek	LIPI	21,3
g.	Penelitian Energi Baru dan Terbarukan	Peningkatan kemampuan nasional dalam mengembangkan dan memanfaatkan sumber-sumber energi baru dan terbarukan (fuelcell, biofuel, sel surya)	Prototype pembangkit energi	1	2	Program Penelitian, Penguasaan, Dan Pemanfaatan iptek	LIPI	54,7

BIDANG PEMBANGUNAN: ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI

PRIORITAS BIDANG: PENGUASAAN, PENGEMBANGAN, DAN PENERAPAN IPTEK (P3-IPTEK)

NO	FOKUS PRIORITAS /KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil Outcomes/Output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN / LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
4	Material							40,5
a.	Penelitian material maju dan nanoteknologi	Pengembangan produk komponen berbasis magnet dan polimer	Paket komponen	2	4	Program Penelitian, Penguasaan, Dan Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi	LIPI	40,5
5	Industri, Rancangbangun dan Rekayasa							164,2
a.	Pengkajian dan Penerapan Teknologi Informasi untuk Pemerintahan dan Industri	Termanfaatkannya dan Terkuasainya kemampuan rekayasa di bidang teknologi informasi dan komunikasi	Jumlah prototipe, alih teknologi, pengujian untuk pendukung transportasi dan pemerintahan pada transportasi udara, sistem informasi dan akuntansi, jaringan infostructure	2 proto tipe,	2 proto tipe, uji pakai	Program Pengkajian dan Penerapan Teknologi	BPPT	56,5
b.	Pengkajian dan Penerapan Teknologi Untuk Transportasi Masal	Termanfaatkannya teknologi transportasi untuk transportasi massal	Jumlah alih teknologi, rekomendasi, prototipe, pengujian dan jasa operasional pada perkereta-apian dan otomotif	2 rekmd	2 kon sults, rekmd, uji coba	Program Pengkajian dan Penerapan Teknologi	BPPT	39,2
c.	Pengkajian dan Penerapan Teknologi Manufaktur untuk Teknologi Energi, Pangan, Transportasi, Kesehatan, dan Hankam	Termanfaatkannya Teknologi Manufaktur untuk Teknologi Energi, Pangan, Transportasi, Kesehatan, dan Hankam	Jumlah rekomendasi, alih teknologi, advokasi, konsultasi, prototipe, mini plant pada otomasi industri	3 advo kasi, rekmd	3 Proto tipe, alih tekn, advo kasi	Program Pengkajian dan Penerapan Teknologi	BPPT	34,5
d.	Pengkajian dan Penerapan Teknologi Industri Pertahanan dan Keamanan (PNLI)	Termanfaatkannya teknologi pertahanan, keamanan dan keselamatan	Prototipe pesawat udara nir awak rekomendasi	1	1	Program Pengkajian dan Penerapan Teknologi	BPPT	10,0

BIDANG PEMBANGUNAN: ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI

PRIORITAS BIDANG: PENGUASAAN, PENGEMBANGAN, DAN PENERAPAN IPTEK (P3-IPTEK)

NO	FOKUS PRIORITAS /KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil Outcomes/Output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN / LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
e.	Litbang Teknologi Pertahanan Keamanan	Terbangunnya kemampuan di dalam negeri dalam upaya merancang, membuat dan mengoperasikan dan menguji sendiri peralatan pertahanan dan keamanan	metoda, prototipe sistem uji safety reliability dan fungsi (paket)	1 1	2 1	Program Penelitian, Penguasaan, Dan Pemanfaatan iptek	LIPI	24,0
6	Informatika dan Telekomunikasi							69,2
a.	Penelitian elektronika dan telekomunikasi	Pengembangan dan pemasangan radar pengintai (<i>surveillance radar</i>) di perairan Indonesia	Prototype Radar (seri 0) Prototype Mobile Radar (seri 0), jaringan Radar terkoneksi litbang <i>air surveillance radar</i> prototipe <i>air surveillance radar</i> pengembangan <i>life detector radar</i>	1	1	Program Penelitian, Penguasaan, Dan Pemanfaatan iptek	LIPI	10,2
b.	Penelitian Tenaga listrik dan mekatronik; Penelitian elektronika dan telekomunikasi; Penelitian Informatika,	Membangun kemampuan perancangan dan rekayasa di dalam negeri	Prototipe Publikasi Ilmiah Jumlah Paten Teknologi Proses	5 8	7 10 2	Program Penelitian, Penguasaan, Dan Pemanfaatan Iptek	LIPI	15,5
c.	Penelitian Informatika	Pengembangan produk <i>open source</i> untuk pelaksanaan <i>e-government</i>	paket	1	1	Program Penelitian, Penguasaan, Dan Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi	LIPI	10,0

BIDANG PEMBANGUNAN: ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI

PRIORITAS BIDANG: PENGUASAAN, PENGEMBANGAN, DAN PENERAPAN IPTEK (P3-IPTEK)

NO	FOKUS PRIORITAS /KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil Outcomes/Output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN / LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
d.	Pengkajian dan Penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi (PN11)	Terkuasainya kemampuan rekayasa di bidang teknologi informasi dan komunikasi yang menunjang prioritas nasional	Terbangun dan termanfaatkannya prototipe Perangkat PC USG Multi Chanel, Perangkat Lunak Free-Open Source Software dan Komputasi serta Sistem pengenalan wicara pada Perisalah (jumlah paket prototype, advokasi, dan rekomendasi)	3	3	Pengkajian dan Penerapan Teknologi	BPPT	30,0
e.	Teknologi Komunikasi dan Sistem Informasi (ICT) pertanian	Termanfaatkannya teknologi informasi dan komunikasi pada pertanian untuk mendukung ketahanan pangan	Prototipe untuk penerapan sistem informasi dan komunikasi untuk pertanian Rekomendasi untuk penerapan sistem informasi dan komunikasi untuk pertanian	1	1	Program Pengkajian dan Penerapan Teknologi	BPPT	3,5
7	Ilmu Kebumihan dan Perubahan Iklim							75,1
a.	Penelitian Geoteknologi (PN9)	Dokumen ilmiah kontribusi Indonesia untuk perubahan iklim	Paket pengumpulan data Paket dokumen ilmiah	1	Final	Program Penelitian, Penguasaan, Dan Pemanfaatan iptek	LIPI	10,0
b.	Penelitian Geoteknologi	Konsep pengurangan resiko bencana kebumihan dan perubahan iklim	publikasi nasional prosiding publikasi internasional konsep tataruang	10 20	20 3 4	Program Penelitian, Penguasaan, Dan Pemanfaatan iptek	LIPI	25,3

BIDANG PEMBANGUNAN: ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI

PRIORITAS BIDANG: PENGUASAAN, PENGEMBANGAN, DAN PENERAPAN IPTEK (P3-IPTEK)

NO	FOKUS PRIORITAS /KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil Outcomes/Output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN / LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
c.	Penelitian Limnologi (Sumber Daya Perairan Darat)	Konsep pengelolaan serta mitigasi dan adaptasi bencana dan perubahan iklim global pada sumber daya perairan darat	makalah ilmiah internasional makalah ilmiah nasional rekomendasi prototipe	2 11 1 3	4 15 2 5	Program Penelitian, Penguasaan, Dan Pemanfaatan iptek	LIPI	25,0
d.	Teknologi Pengendalian dan Mitigasi Dampak Pemanasan Global (PN 9)	Termanaatkannya neraca karbon dan rekomendasi penurunan carbon pada sektor pertanian, kehutanan, lahan basah. Model fisik kolamkultur penyerap CO2, Penyempurnaan dan pengujian peralatan produksi flare	Rekomendasi kebijakan pengurangan emisi dan peningkatan carbon sink dan Pilot plant fotobioreaktor untuk penyerap CO2 (paket rekomendasi dan model)	1	1	Program Pengkajian dan Penerapan Teknologi	BPPT	14,9
8	Ilmu Pengetahuan Sosial dan Kemasyarakatan							90,6
a.	- Penelitian Kependudukan - Penelitian politik - Penelitian Sumber Daya Regional - Penelitian masyarakat dan budaya - Penelitian Ekonomi	Terwujudnya penguasaan, pengembangan, dan penerapan iptek dalam ilmu-ilmu sosial, inovasi-ekonomi, budaya, perilaku dan kognitif, serta hukum dan politik	Kajian Makalah/ publikasi ilmiah	17 40	17 40	Program Penelitian, Penguasaan, Dan Pemanfaatan iptek	LIPI	46,5
b.	Litbang Ilmu Pengetahuan Sosial dan Kebudayaan	Kajian ilmu sosial & kemanusiaan untuk keutuhan NKRI Ketahanan dan daya saing wilayah serta masyarakat pesisir	paket kebijakan paket	1 1	1 1	Program Penelitian, Penguasaan, Dan Pemanfaatan Iptek	LIPI	6,5 24,5

BIDANG PEMBANGUNAN: ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI

PRIORITAS BIDANG: PENGUASAAN, PENGEMBANGAN, DAN PENERAPAN IPTEK (P3-IPTEK)

NO	FOKUS PRIORITAS /KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil Outcomes/Output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN / LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
	c. Pengembangan dan perlindungan kekayaan budaya (PN11)	Pengembangan dan perlindungan kekayaan budaya (pencegahan kepunahan bahasa masyarakat lokal)	paket	1	1	Program Penelitian, Penguasaan, Dan Pemanfaatan iptek	LIPI	13,1
9	Ilmu Ketenaganukliran dan Pengawasannya							920,1
	a. Pengembangan Aplikasi Teknologi Isotop dan Radiasi (PN 5)	Peningkatan upaya penelitian dan pengembangan bidang pertanian yang mampu menciptakan benih unggul dan hasil penelitian lainnya menuju kualitas dan produktivitas hasil pertanian nasional yang tinggi.	varietas padi (padi sawah, padi gogo, padi dataran tinggi dan padi hibrida) varietas kedelai (jenis biji besar, genjah, produksi tinggi dan jenis biji hitam) varietas kacang tanah dan kacang hijau varietas gandum tropis dan sorghum	1 1	3 1 1 2	Penelitian Pengembangan dan Penerapan Energi Nuklir, Isotop dan Radiasi	BATAN	21,0
	b. Penyusunan Pedoman Infrastruktur Dasar Pendukung Program Energi Nuklir Nasional (PN 8)	Peningkatan pemanfaatan energi terbarukan termasuk energi alternatif <i>geothermal</i> sehingga mencapai 2.000 MW pada 2012 dan 5.000 MW pada 2014 dan dimulainya produksi <i>coal bed methane</i> untuk membangkitkan listrik pada 2011 disertai pemanfaatan potensi tenaga surya, <i>microhydro</i> , dan nuklir secara bertahap.	Paket Penyiapan Infrastruktur Tapak PLTN dan Penyusunan Detail Desain	1	1	Penelitian Pengembangan dan Penerapan Energi Nuklir, Isotop dan Radiasi	BATAN	453,6
	Diseminasi Hasil Litbang Iptek Nuklir (PN 8)		Paket Sosialisasi PLTN (media), advokasi masyarakat dan dunia usaha dan stakeholder yang terkait lainnya untuk persiapan implementasi program PLTN	3	3	Penelitian Pengembangan dan Penerapan Energi Nuklir, Isotop dan Radiasi	BATAN	138,0

BIDANG PEMBANGUNAN: ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI

PRIORITAS BIDANG: PENGUASAAN, PENGEMBANGAN, DAN PENERAPAN IPTEK (P3-IPTEK)

NO	FOKUS PRIORITAS /KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil Outcomes/Output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN / LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
c.	Pengembangan Teknologi Bahan Industri Nuklir	Diperolehnya Bahan unggul Magnetik untuk Aplikasi Diagnostik	Dokumen teknis Protoipe bahan unggul Publikasi ilmiah	1 7	1 7	Penelitian Pengembangan dan Penerapan Energi Nuklir, Isotop dan Radiasi	BATAN	13,6
d.	Pengembangan Teknologi Akselerator	Diperolehnya Desain Mesin berkas elektron untuk industri berbasis lateks karet alam dan rancangan detil siklotron 13 MeV untuk pembuatan radiofarmaka dan pengembangan obat	Prototipe Mesin Berkas Elektron Dokumen teknis siklotron 13 MeV Publikasi Ilmiah	1 1 6	1 1 7	Penelitian Pengembangan dan Penerapan Energi Nuklir, Isotop dan Radiasi	BATAN	17,6
e.	Pengembangan Teknologi Biomedika Nuklir, Keselamatan dan Metrologi Radiasi	Diperolehnya paket teknologi penatalaksanaan kanker payudara, dan serviks, bahan vaksin malaria tropika (<i>Plasmodium falciparum</i>), metode standarisasi dan kalibrasi radiasi	Dokumen teknis/metode Paket teknologi penatalaksanaan kanker payudara, dan serviks Bahan vaksin Prototipe sistem <i>carbone monitoring dan sistem</i> deteksi kontaminasi interna Publikasi ilmiah	4 4	1 1 2 4	Penelitian Pengembangan dan Penerapan Energi Nuklir, Isotop dan Radiasi	BATAN	32,0
f.	Pengembangan Eksplorasi dan Teknologi Pengelolaan Bahan Galian Nuklir	Diperolehnya data sumberdaya U dan Thorium di Indonesia serta pengembangan teknologi pengolahan bijih uranium dan thorium	Data Teknis potensi Th dan U di Indonesia, Dokumen teknis pemurnian bijih Uranium Paket teknologi pengolahan bijih uranium dan thorium	1 1	1 1	Penelitian Pengembangan dan Penerapan Energi Nuklir, Isotop dan Radiasi	BATAN	26,5

BIDANG PEMBANGUNAN: ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI

PRIORITAS BIDANG: PENGUASAAN, PENGEMBANGAN, DAN PENERAPAN IPTEK (P3-IPTEK)

NO	FOKUS PRIORITAS /KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil Outcomes/Output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN / LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
g.	Pengembangan Teknologi Bahan Bakar Nuklir	Diperolehnya paket teknologi penguasaan dan fabrikasi bahan bakar PWR serta dokumen rekayasa pabrik konversi bahan bakar nuklir	Dokumen Teknis Paket teknologi Publikasi ilmiah	3 3	1 2 3	Penelitian Pengembangan dan Penerapan Energi Nuklir, Isotop dan Radiasi	BATAN	16,9
h.	Pengembangan Teknologi Pengelolaan Limbah Radioaktif dan Lingkungan	Diperolehnya Paket teknologi Pengelolaan Limbah Radioaktif dan Perancangan instalasi pengolahan limbah cair padat yang dihasilkan dari operasi PLTN.	Dokumen Teknis Paket Teknologi Pototipe Publikasi ilmiah	4 1 4	2 1 4	Penelitian Pengembangan dan Penerapan Energi Nuklir, Isotop dan Radiasi	BATAN	20,3
i.	Pengembangan Perekayasa Perangkat Nuklir	Diperolehnya paket pengembangan teknologi rekayasa perangkat nuklir untuk kesehatan, industri dan sistem kendali reaktor	Prototipe Perangkat Nuklir untuk kesehatan Prototipe Perangkat Nuklir untuk industri Prototipe Perangkat Nuklir untuk sistem kendali reaktor Publikasi ilmiah	4 1 1 6	3 1 1 4	Penelitian Pengembangan dan Penerapan Energi Nuklir, Isotop dan Radiasi	BATAN	20,3
j.	Pengembangan Teknologi dan Keselamatan Reaktor Nuklir	Diperolehnya Desain konseptual reaktor riset inovatif; desain konseptual reaktor daya maju kogenerasi serta Evaluasi teknologi, keselamatan dan keandalan reaktor daya PWR	Data Teknis Desain konseptual reaktor riset dan daya Publikasi ilmiah	3 3	3 1 3	Penelitian Pengembangan dan Penerapan Energi Nuklir, Isotop dan Radiasi	BATAN	19,1

BIDANG PEMBANGUNAN: ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI

PRIORITAS BIDANG: PENGUASAAN, PENGEMBANGAN, DAN PENERAPAN IPTEK (P3-IPTEK)

NO	FOKUS PRIORITAS /KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil Outcomes/Output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN / LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
k.	Pengembangan Aplikasi Teknologi Isotop dan Radiasi	Diperolehnya Aplikasi teknologi isotop dan radiasi di bidang peternakan, kesehatan dan industri	Paket Teknologi Publikasi DN Publikasi LN	4 10 2	4 10 2	Penelitian Pengembangan dan Penerapan Energi Nuklir, Isotop dan Radiasi	BATAN	50,4
l.	Pengembangan Teknologi Produksi Radioisotop dan Radiofarmaka	Diperolehnya paket pengembangan teknologi produksi radioisotop dan radiofarmaka	Paket teknologi produksi radioisotop Paket teknologi produksi radiofarmaka Paten Publikasi DN Publikasi LN	1 1 10 2	1 1 10 2	Penelitian Pengembangan dan Penerapan Energi Nuklir, Isotop dan Radiasi	BATAN	24,6
m.	Pengkajian Pengawasan Instalasi dan Bahan Nuklir (IBN)	Tersedianya hasil kajian IBN	Dokumen kajian bidang IBN Terkait PLTN	8	8	Pengawasan Pemanfaatan Tenaga Nuklir	BAPETEN	7,6
n.	Perumusan dan Pengembangan Peraturan Perundangan Instalasi dan Bahan Nuklir (IBN)	Tersedianya rancangan peraturan perundangan IBN	Dokumen Rancangan Peraturan bidang IBN Terkait PLTN	6	7	Pengawasan Pemanfaatan Tenaga Nuklir	BAPETEN	8,0
o.	Pengembangan dan Pengelolaan Pelayanan Perizinan Instalasi dan Bahan Nuklir (IBN)	Terselenggaranya pelayanan perizinan IBN	Dokumen Perizinan Terkait PLTN	3	3	Pengawasan Pemanfaatan Tenaga Nuklir	BAPETEN	6,9
p.	Penyelenggaraan dan Pengembangan Inspeksi Keselamatan, Keamanan dan Safeguards Instalasi dan Bahan Nuklir (IBN)	Terselenggaranya inspeksi keselamatan instalasi nuklir, safeguard dan proteksi fisik yang efektif dan efisien	Laporan Hasil Inspeksi	54	54	Pengawasan Pemanfaatan Tenaga Nuklir	BAPETEN	15,2

BIDANG PEMBANGUNAN: ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI

PRIORITAS BIDANG: PENGUASAAN, PENGEMBANGAN, DAN PENERAPAN IPTEK (P3-IPTEK)

NO	FOKUS PRIORITAS /KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil Outcomes/Output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN / LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
q.	Penyelenggaraan dan Pengembangan Keteknikan, Sistem Manajemen dan Kesiapsiagaan Nuklir	Terselenggaranya pengembangan keteknikan, sistem manajemen dan kesiapsiagaan nuklir	Dokumen Pengembangan Keteknikan, Sistem Manajemen dan Kesiapsiagaan Nuklir	6	6	Pengawasan Pemanfaatan Tenaga Nuklir	BAPETEN	28,7
10	Ilmu Penerbangan dan Antariksa							1.246,5
a.	Pengembangan Teknologi Roket	Peningkatan kemampuan penguasaan teknologi roket	1. Jumlah tipe/ jenis roket yang dikembangkan; 2. Jumlah unit roket yang diuji statik; 3. Jumlah roket yang diuji terbang; 4. Jumlah produksi amonium perklorat (AP) oleh LAPAN (ton); 5. Jumlah roket dengan bahan baku AP produk LAPAN yang diuji terbangkan 6. % Peningkatan Kapasitas Sarpras Litbang Roket untuk mencapai minimum kebutuhan	10 28 31 2 5 -	9 24 10 20 15 45	Program Pengembangan Teknologi Penerbangan dan Antariksa	LAPAN	632,2
b.	Pengembangan teknologi satelit	Peningkatan kemampuan penguasaan teknologi satelit dan stasiun bumi	1. Jumlah Satelit yg dibuat/ diintegrasikan di dalam negeri 2. Jumlah Satelit yang akan diluncurkan 3. Jumlah rancangan satelit baru kerjasama dengan pengguna 4. Jumlah pembangunan stasiun bumi utama penerima data & pengendali satelit 5. Jumlah Doktek satelit (user requirement, mission definition, desain satelit, desain stasiun bumi, rancangan pengolahan data, bentuk produk data)	2 - - - 2	1 - - - -	Program Pengembangan Teknologi Penerbangan dan Antariksa	LAPAN	189,9

BIDANG PEMBANGUNAN: ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI

PRIORITAS BIDANG: PENGUASAAN, PENGEMBANGAN, DAN PENERAPAN IPTEK (P3-IPTEK)

NO	FOKUS PRIORITAS /KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil Outcomes/Output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN / LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
c.	Uji terbang roket dan akuisisi data ionosfer, geomag net, dan meteo	Kontinuitas operasi instalasi uji terbang, stasiun pengamat dirgantara untuk mendukung litbang dan pemanfaatan sains antariksa	% Kontinuitas operasi instalasi uji terbang dan stasiun pengamat dirgantara	100	100	Program Pengembangan Teknologi Penerbangan dan Antariksa	LAPAN	25,9
d.	Pengembangan Teknologi Penerbangan	Rancang bangun pesawat nir awak, ramjet dan diseminasi pemanfaatan teknologi dirgantara	1. Jumlah jenis pesawat nir awak dan propulsi jet yang dikembangkan 2. Jumlah pesawat nir awak dan ramjet yang di uji terbang 3. Jumlah sistem ground segment pesawat nir awak dan pesawat ramjet yang dikembangkan 4. Jumlah Doktek Spinoff Teknologi Penerbangan	1 - 1 2	- 1 2 2	Program Pengembangan Teknologi Penerbangan dan Antariksa	LAPAN	143,3
e.	Pengembangan Teknologi Dan Bank Data Penginderaan Jauh (PUSDATA)	Penguatan kemampuan akuisisi data satelit wilayah Indonesia	1. Jumlah penelitian dan pengembangan teknologi penginderaan jauh 2. Jumlah doktek kajian sistem satelit multimisi (Sistem Akuisisi Data NPP/NPOESS, LDCM, Arsitektur system Pengolahan Data Satelit Multimisi) 3. % Jumlah data yang terdistribusi 4. Jumlah modul Pengolahan citra berbasis Open Source	4 2 80	4 80 1	Program Pengembangan Teknologi Penerbangan dan Antariksa	LAPAN	93,9

BIDANG PEMBANGUNAN: ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI

PRIORITAS BIDANG: PENGUASAAN, PENGEMBANGAN, DAN PENERAPAN IPTEK (P3-IPTEK)

NO	FOKUS PRIORITAS /KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil Outcomes/Output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN / LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
f.	Akuisisi dan pengo lahan data satelit penginderaan jauh sumber daya alam serta pelayanan pengguna	Kontinuitas operasi sistem stasiun bumi satelit penginderaan jauh sumber daya alam Parepare untuk mendukung pelayanan kepada pengguna	1. % Keberhasilan akuisisi data sa-telit penginderaan jauh multi misi 2. % Jumlah " near real time" catalog metadata tepat waktu 3. Jumlah kegiatan pelayanan teknis kepada pengguna untuk kawasan Indonesia Tengah 4. % integrasi sub Sistem stasiun bumi dan Uji coba operasi Akuisisi da ta NPP/ NPOESS, Landsat 8	95% 100 4 -	95% 100 4 50	Program Pengembangan Teknologi Penerbangan dan Antariksa	LAPAN	55,1
g.	Ops. stasiun bumi penginderaan jauh cuaca, stasiun pengamat geomagnet, meteor, dan atmosfer dan Stasiun Telemetry Tracking Commands (TTC) dan pelayanan pengguna (BIAK)	Kontinuitas operasi stasiun bumi satelit peng inderaan jauh cuaca Biak untuk mendukung pelayanan kepada pengguna	1. % Kontinuitas operasi stasiun bumi penginderaan jauh cuaca, stasiun pengamat geomagnet, meteo dan atmosfer serta TTC 2. Jumlah kegiatan pelayanan teknis kepada pengguna untuk kawasan Indonesia Timur	95 2	95 2	Program Pengembangan Teknologi Penerbangan dan Antariksa	LAPAN	25,9

BIDANG PEMBANGUNAN: ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI

PRIORITAS BIDANG: PENGUASAAN, PENGEMBANGAN, DAN PENERAPAN IPTEK (P3-IPTEK)

NO	FOKUS PRIORITAS /KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil Outcomes/Output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN / LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
h.	Pengembangan Pemanfaatan Penginderaan Jauh	Pemanfaatan data satelit untuk pemantauan sumber daya lahan dan kondisi lingkungan	1. Jumlah penelitian dan pemanfaatan teknologi penginderaan jauh 2. % kelengkapan data satelit lingkungan dan cuaca wilayah Indonesia 3. Jumlah jenis informasi spasial penginderaan jauh yang dapat diakses terkait pemantauan dan sumber daya alam, mitigasi bencana dan hankam 4. Jumlah basis data spasial penutup dan penggunaan lahan (satuan Propinsi) 5. % Downtime Operasi Penyajian Info mitigasi bencana dan Inventarisasi SDAL	5 96 7 2 15	6 100 9 4 5	Program Pengembangan Teknologi Penerbangan dan Antariksa	LAPAN	80,4
TOTAL								3.612,1



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2010
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH NASIONAL
(RPJMN)
TAHUN 2010--2014**

**BUKU II
MEMPERKUAT SINERGI ANTARBIDANG PEMBANGUNAN**

**BAB V
SARANA DAN PRASARANA**

**Diperbanyak Oleh:
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS)
2010**



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
BAB V BIDANG SARANA DAN PRASARANA	II.5-1
5.1 Kondisi Umum	II.5-2
5.1.1 Sumber Daya Air	II.5-3
5.1.2 Transportasi	II.5-4
5.1.3 Perumahan dan Permukiman	II.5-9
5.1.4 Komunikasi dan Informatika	II.5-11
5.1.5 Energi dan Ketenagalistrikan	II.5-13
5.1.6 Penanggulangan Semburan Lumpur Sidoarjo	II.5-22
5.2 Permasalahan dan Sasaran Pembangunan Bidang Sarana dan Prasarana	II.5-22
5.2.1 Sumber Daya Air	II.5-24
5.2.2 Transportasi	II.5-27
5.2.3 Perumahan dan Permukiman	II.5-32
5.2.3.1 Perumahan	II.5-32
5.2.3.2 Permukiman	II.5-33
5.2.4 Komunikasi dan Informatika	II.5-38
5.2.5 Energi dan Ketenagalistrikan	II.5-44
5.2.6 Penanggulangan Semburan Lumpur Sidoarjo	II.5-52
5.3 Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Bidang Sarana dan Prasarana	II.5-39
5.3.1 Meningkatkan Pelayanan Sarana dan Prasarana Sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal	II.5-55
5.3.1.1 Sumber Daya Air	II.5-55
5.3.1.2 Transportasi	II.5-56
5.3.1.3 Perumahan dan Permukiman	II.5-58
5.3.1.4 Komunikasi dan Informatika	II.5-61
5.3.1.5 Energi dan Ketenagalistrikan	II.5-62
5.3.1.6 Penanggulangan Semburan Lumpur Sidoarjo	II.5-63
5.3.2 Mendukung Peningkatan daya saing sektor riil	II.5-64
5.3.2.1 Sumber Daya Air	II.5-64
5.3.2.2 Transportasi	II.5-65
5.3.2.3 Komunikasi dan Informatika	II.5-66
5.3.2.4 Energi dan Ketenagalistrikan	II.5-69
5.3.2.5 Penanggulangan Semburan Lumpur Sidoarjo	II.5-71
5.3.3 Meningkatkan Kerjasama Pemerintah dan Swasta	II.5-72

5.3.3.1 Sumber Daya Air.....	II.5-73
5.3.3.2 Transportasi.....	II.5-73
5.3.3.3 Perumahan dan Permukiman.....	II.5-74
5.3.3.4 Komunikasi dan Informatika	II.5-75
5.3.3.5 Energi dan Ketenagalistrikan	II.5-76



BAB V

BIDANG SARANA DAN PRASARANA

Bidang sarana dan prasarana memiliki peranan yang sangat penting dalam mendukung aktivitas ekonomi, sosial, budaya, serta kesatuan dan persatuan bangsa, terutama sebagai modal dasar dalam memfasilitasi interaksi dan komunikasi di antara kelompok masyarakat, serta mengikat dan menghubungkan antarwilayah. Pengembangan sarana dan prasarana sumber daya air ditujukan untuk mendukung ketahanan pangan nasional dan penyediaan air untuk berbagai keperluan masyarakat, seperti air minum, pembangkit tenaga listrik dan pengendalian banjir yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Demikian pula, sarana dan prasarana lainnya, seperti jalan, jembatan, prasarana dan sarana dasar permukiman yang merupakan modal esensial masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sosial-ekonominya. Selain itu, diperlukan pula pengembangan sarana dan prasarana komunikasi dan informatika yang ditujukan untuk menjamin kelancaran arus informasi baik untuk mendukung kegiatan pemerintahan, perekonomian, maupun sosial.

Sarana dan prasarana memiliki peran penting dalam mendukung daya saing ekonomi global terutama dalam penyediaan jaringan distribusi, sumber energi, dan input produksi lainnya. Jaringan transportasi serta jaringan komunikasi dan informatika merupakan fasilitas yang menghubungkan sumber-sumber produksi, pasar dan para konsumen, yang secara sosial juga merupakan bagian dari ruang publik yang dapat digunakan untuk melakukan sosialisasi antarkelompok masyarakat guna mengartikulasikan diri dan membangun ikatan sosial-budaya. Dalam konteks yang lebih luas, jaringan transportasi serta jaringan komunikasi dan informatika juga berfungsi sebagai pengikat dan pemersatu wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai suatu entitas politik yang berdaulat, dan juga untuk menghadapi serangan terhadap ketahanan dan kedaulatan bangsa melalui media dunia maya yang saat ini semakin meningkat.

Fungsi sarana dan prasarana sebagai roda penggerak pertumbuhan ekonomi ditunjukkan pada peran transportasi yang dapat memungkinkan orang, barang, dan jasa diangkut dari satu tempat ke tempat lain, serta peran jaringan komunikasi dan informatika yang memungkinkan pertukaran informasi secara cepat (*real time*) menembus batas ruang dan waktu. Peranannya sangat penting, baik dalam proses produksi maupun dalam menunjang distribusi komoditi ekonomi dan ekspor. Telekomunikasi, listrik, dan airpun merupakan elemen sangat penting dalam proses produksi dari sektor-sektor ekonomi, seperti perdagangan, industri, dan pertanian.

Pemanasan global akan memicu terjadinya perubahan iklim dunia, maka pendekatan pembangunan sarana dan prasarana di masa mendatang perlu dikaji secara

mendalam. Pemanasan global diprediksi akan mempengaruhi penggunaan lahan, debit-debit air sungai dikhawatirkan akan menyusut, yang akan berpengaruh pada keandalan/kerentanan sarana dan prasarana. Oleh karena itu, konsep pembangunan berkelanjutan harus menjadi salah satu pertimbangan utama dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan sarana dan prasarana, terutama dalam pengelolaan sumber daya alam, penyediaan sarana transportasi, dan penggunaan energi pembangkit listrik.

5.1 Kondisi Umum

Sejalan dengan proses pembaharuan di berbagai bidang pembangunan, telah dilaksanakan perubahan mendasar dalam hal pola dan pembangunan bidang sarana dan prasarana. Dari sisi kerangka kebijakan dan kerangka regulasi, beberapa peraturan perundang-undangan telah dilakukan reformasi yang menyeluruh dalam penyediaan sarana dan prasarana, baik pada tatanan sektoral maupun lintas-sektor. Upaya-upaya yang telah dilakukan, antara lain: *pertama*, perubahan peran pemerintah menjadi fasilitator atau *enabler*, melalui pemberian bimbingan teknis dan nonteknis secara terus-menerus kepada masyarakat untuk dapat merencanakan, membangun dan mengelola sendiri sarana dan prasarana. *Kedua*, penekanan pada keberlanjutan (*sustainability*) pelayanan melalui investasi sarana dan prasarana yang efisien dan efektif agar dapat memberikan manfaat dan pelayanan kepada masyarakat. *Ketiga*, penerapan pendekatan tanggap kebutuhan (*demand responsive approach*) dengan lebih meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, baik dalam pemilihan sistem yang dibangun, pola pendanaan, maupun tata cara pengelolaannya.

Pemerintah juga mendorong partisipasi swasta, masyarakat, dan pemerintah daerah dalam pelayanan dan penyelenggaraan sarana dan prasarana. Skema pembangunan sarana dan prasarana melalui kerjasama pemerintah dan swasta (KPS) yang tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) No. 67 Tahun 2005 terus menerus dilakukan penyempurnaan. Revisi terhadap Perpres tersebut disertai pula dengan pedoman teknis pelaksanaan KPS untuk tingkat pusat dan daerah. Pemerintah juga telah meluncurkan Paket Kebijakan Ekonomi 2008—2009 dalam Inpres No 5 tahun 2008 tentang Fokus Pembangunan Ekonomi Tahun 2008—2009 sebagai kelanjutan dari berbagai kebijakan sebelumnya (Inpres No 3 Tahun 2006 tentang Paket Kebijakan Perbaikan Iklim Investasi dan Inpres No 6 Tahun 2007 tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah). Upaya tersebut dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan yang menghambat investasi pada sektor sarana dan prasarana, termasuk persoalan yang terkait dengan partisipasi sektor swasta. Elemen penting paket kebijakan tersebut adalah kerangka kerja bagi KPS, termasuk di dalamnya mekanisme penyiapan proyek, proses tender yang transparan dan akuntabel, serta alokasi risiko antara investor dan pemerintah.

Beberapa Undang-Undang (UU) yang terkait dengan pelayanan sarana dan prasarana telah direvisi, di antaranya adalah UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan, UU

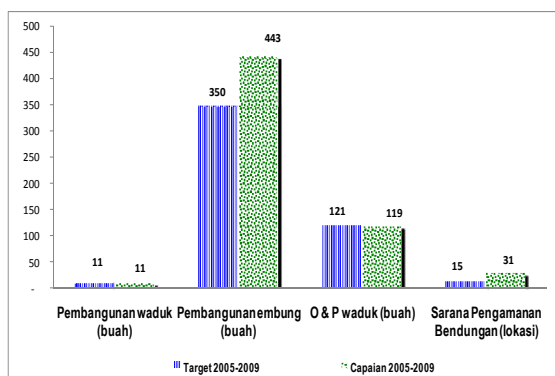
No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, UU No. 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian, UU No. 30 Tahun 2007 tentang Energi, UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, UU No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan, dan UU No. 38 Tahun 2009 tentang Pos, serta UU No. 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan.

5.1.1 Sumber Daya Air

Untuk menjaga kelestarian, fungsi, dan ketersediaan air, serta meningkatkan daya tampung, telah dibangun 11 waduk dengan kapasitas 79 juta m³, yaitu: Waduk Keuliling di NAD, Telaga Tunjung dan Benel di Bali, Ponre-Ponre di Sulawesi Selatan, Panohan dan Lodan di Jawa Tengah, Kedung Brubus, Nipah, dan Gonggang di Jawa Timur, serta Bilal dan Binalatung di Kalimantan Timur. Waduk-waduk tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan air irigasi, rumah tangga, industri serta keperluan pembangkit listrik. Selain itu, telah dilakukan pula pembangunan embung dan kegiatan konservasi lainnya (Gambar 5.1).

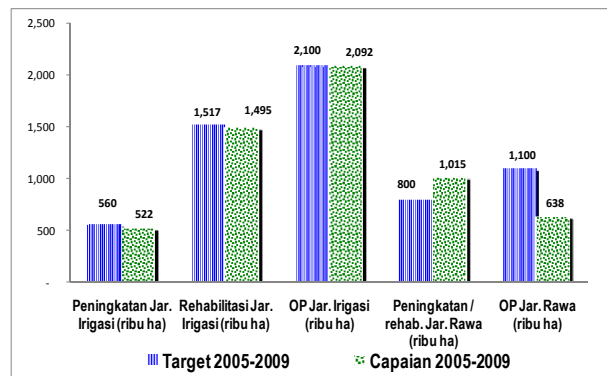
Dalam upaya memenuhi kebutuhan irigasi untuk mendukung ketahanan pangan nasional, dilakukan peningkatan luas layanan jaringan irigasi seluas 521 ribu hektar, serta rehabilitasi jaringan irigasi seluas 1,5 juta hektar. Untuk optimalisasi fungsi irigasi, Pemerintah Pusat telah melakukan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi seluas 2,1 juta hektar per tahun. Rehabilitasi juga telah dilakukan pada jaringan rawa seluas 1 juta hektar yang didukung oleh upaya optimalisasi jaringan rawa melalui kegiatan operasi dan pemeliharaan jaringan rawa seluas 635 ribu hektar per tahun (Gambar 5.2).

GAMBAR 5.1 PERKIRAAN CAPAIAN PENGELOLAAN DAN KONSERVASI SUNGAI, DANAU DAN SUMBER AIR LAINNYA TAHUN 2005 - 2009



Sumber: Dep. Pekerjaan Umum, 2009 (diolah)

GAMBAR 5.2 PERKIRAAN CAPAIAN PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI, RAWA DAN JARINGAN PENGAIRAN LAINNYA TAHUN 2005 - 2009

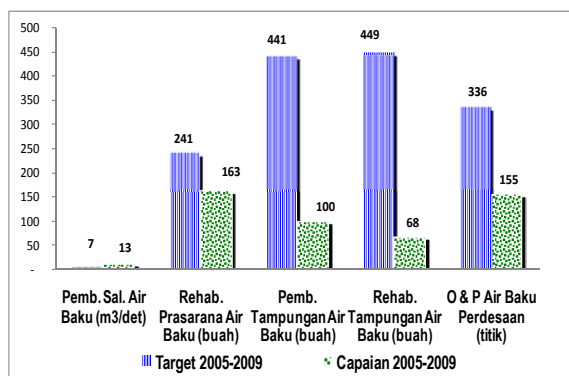


Sumber: Dep. Pekerjaan Umum, 2009 (diolah)

Dalam upaya meningkatkan pemenuhan kebutuhan air baku bagi rumah tangga, industri, dan perkotaan, telah dibangun saluran pembawa air baku dengan kapasitas

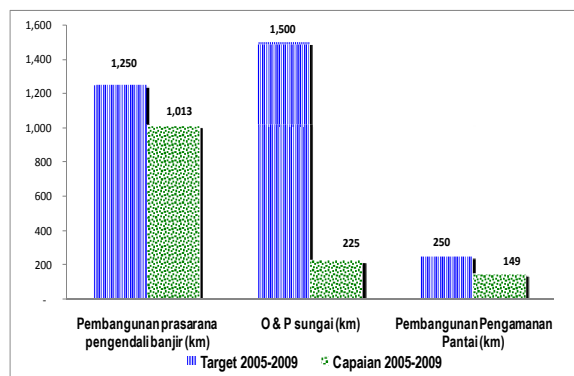
layanan lebih kurang 12,66 m³/det yang mampu memenuhi kebutuhan air baku sekitar 10,9 juta jiwa (Gambar 5.3). Sementara itu, dalam rangka mengendalikan dan mengurangi dampak bencana akibat banjir dan abrasi pantai, telah dibangun prasarana pengendali banjir untuk mengamankan kawasan seluas 12,8 ribu hektar. Sebagai langkah antisipasi terhadap banjir, telah dipasang dan dioperasikan *flood forecasting* dan *warning system* di Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang, Bengawan Solo, Pemali Juana, Cimanuk-Cisanggarung, Citanduy, Serayu Opak, Mahakam, Brantas, dan Citarum (Gambar 5.4).

GAMBAR 5.3 PERKIRAAN CAPAIAN PENYEDIAAN DAN PENGELOLAAN AIR BAKU TAHUN 2005 - 2009



Sumber: Dep. Pekerjaan Umum, 2009 (diolah)

GAMBAR 5.4 PERKIRAAN CAPAIAN PENGENDALIAN BANJIR DAN PENGAMANAN PANTAI TAHUN 2005 - 2009



Sumber: Dep. Pekerjaan Umum, 2009 (diolah)

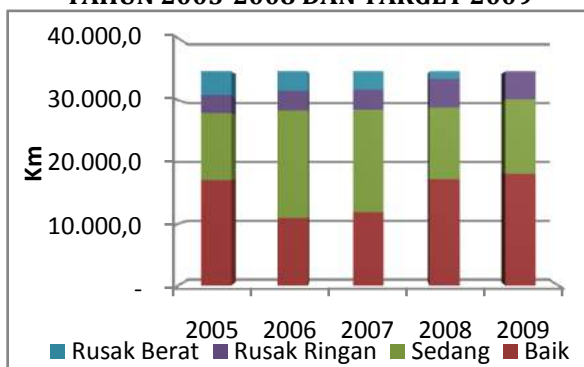
Sebagai dasar hukum pelaksanaan pengelolaan sumber daya air, telah diterbitkan empat Peraturan Pemerintah (PP) dari sepuluh PP turunan UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, yaitu: (a) PP No. 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum; (b) PP No. 20 Tahun 2006 tentang Irigasi; (c) PP No. 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air; dan (d) PP No. 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah. Beberapa peraturan perundangan yang telah disahkan sebagai pedoman operasional dalam pelaksanaan koordinasi/pengelolaan sumber daya air, yaitu: (a) Perpres No. 12 Tahun 2008 tentang Dewan Sumber Daya Air; (b) Keppres No. 6 Tahun 2009 tentang Pembentukan Dewan Sumber Daya Air; dan (c) Kepmen PU No. 390/KPTS/M/2007 tentang Penentuan Status Daerah Irigasi serta 4 (empat) Permen PU lainnya.

5.1.2 Transportasi

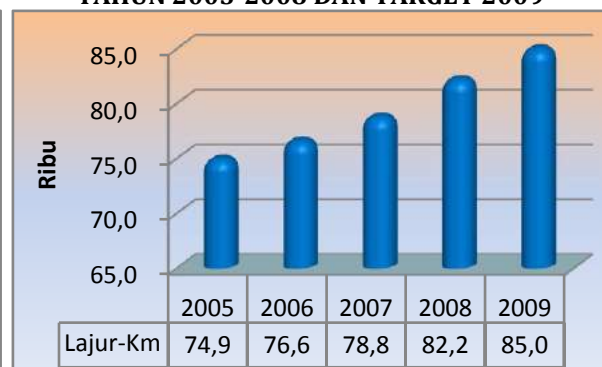
Beberapa kemajuan telah berhasil dicapai dalam pembangunan transportasi jalan, yaitu pemeliharaan jalan nasional sepanjang 136.127 km, pemeliharaan jembatan sepanjang 161.054 m, peningkatan kapasitas dan struktur jalan nasional sepanjang

15.702 km dan jembatan sepanjang 45.231 m terutama pada lintas Timur Sumatera, Pantura Jawa, lintas Selatan Kalimantan, lintas barat Sulawesi dan lintas-lintas lainnya; pembangunan jalan di kawasan perbatasan hingga mencapai 670,2 km; pembangunan jalan di pulau terpencil/terdepan hingga mencapai 571,8 km; pembangunan Jembatan Suramadu; serta pengadaan lahan untuk pembangunan jalan tol. Upaya tersebut telah meningkatkan kinerja transportasi jalan yang ditunjukkan dengan bertambahnya kapasitas jaringan jalan nasional lajur-km dari 73.620 pada tahun 2004 menjadi 82.189 lajur km pada akhir tahun 2008 dengan kondisi jalan mantap mencapai 83,23 persen, rusak ringan 4618 km (13,34 persen), dan rusak berat 1.190 km (3,44 persen) dan kecepatan rata-rata 46 km/jam. Sedangkan, total panjang jalan tol yang telah beroperasi 693,27 km yang terdiri dari 22 ruas.

GAMBAR 5.5: PENCAPAIAN KONDISI JALAN TAHUN 2005-2008 DAN TARGET 2009



GAMBAR 5.6: PENCAPAIAN LAJUR KM TAHUN 2005-2008 DAN TARGET 2009



Sumber: Departemen Pekerjaan Umum, 2009.

Sementara itu, pembangunan sarana lalu lintas angkutan jalan yang telah dicapai, antara lain berupa (a) pengadaan fasilitas keselamatan, seperti marka jalan sepanjang 2.829.555 m dan pagar pengaman jalan 118.424 m; (b) pengadaan bus ukuran sedang dan besar untuk BRT mencapai 40 unit; pengadaan 78 unit bus perintis, 60 unit bus sedang non AC, 45 unit bus sedang AC dan 30 unit bus besar untuk angkutan perintis, kota/pelajar/mahasiswa serta pelayanan subsidi bus perintis untuk 111 trayek/lintasan perintis pada 21 provinsi; dan (c) pembangunan baru dan lanjutan pembangunan terminal di tujuh lokasi, di antaranya terminal Batas Antar Negara Sei Ambawang-Pontianak (lanjutan), terminal Matoain (NTT), terminal Kuningan (Jawa Barat), Wonosari (DIY), Palangkaraya (Kalteng), terminal Badung (Bali), terminal Aceh Timur (NAD), serta lanjutan rehabilitasi terminal di Provinsi Maluku dalam rangka pelaksanaan Inpres 6 tahun 2003 tentang Percepatan Pemulihan Pembangunan Provinsi Maluku dan Provinsi Maluku Utara Pascakonflik.

Capaian pembangunan transportasi sungai, danau, dan penyeberangan, antara lain: (a) pengadaan rambu penyeberangan sebanyak 29 buah, rambu sungai dan danau

mencapai 2.530 buah; (b) pengerukan alur kolam pelabuhan 2.225.000 m³, (c) pembangunan dermaga penyeberangan sebanyak 151 unit (baru dan lanjutan), dan pembangunan dermaga danau 36 unit (baru dan lanjutan); (d) pembangunan kapal penyeberangan perintis 30 unit (baru dan lanjutan), pembangunan bus air 28 unit, dan *speed boat* 10 unit; dan (e) pengoperasian kapal penyeberangan perintis pada 76 lintas dalam provinsi dan 8 lintas antarprovinsi.

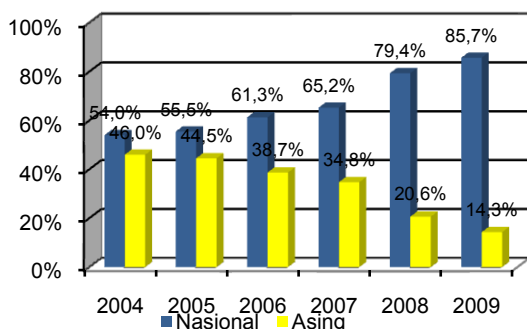
Hasil yang dicapai dalam penyediaan transportasi perkeretaapian di antaranya berupa; (a) peningkatan jalan rel sepanjang 1.849,62 km dan pembangunan jalur KA baru sepanjang 244,80 km, antara lain, di NAD, lintas Simpang—Indralaya (Kampus Unsri), partial *double track* lintas Tulungbuyut—Blambangan Umpu, jalur ganda Tanah Abang—Serpong, jalur ganda lintas Cikampek—Cirebon, Yogyakarta-Kutoarjo, Tegal—Pekalongan, dan lintas Cirebon—Kroya; (b) peningkatan jembatan KA 161 unit; (c) modernisasi dan peningkatan persinyalan, telekomunikasi dan listrik (sintelis) 96 paket; (d) pengadaan rel mencapai 142.311 ton; (e) pengadaan wesel 100 unit; (f) rehabilitasi jalan KA lintas Bogor-Sukabumi sepanjang 57 km; (g) pembangunan Depo Depok; (h) *engineering service* MRT Jakarta; (i) pembangunan *double double track* Manggarai-Cikarang; (j) pengadaan kereta kelas ekonomi (K3) 168 unit, KRD/KRDI 46 unit, KRL 108 unit, kereta kedinasan 2 unit, railbus (tahap 1) 3 unit, serta *public service obligation* (PSO) untuk angkutan kereta api kelas ekonomi.

Pada pembangunan transportasi laut telah dilaksanakan: (a) pembangunan 15 pelabuhan peti kemas (antara, lain Pelabuhan Tanjung Priok, Tanjung Perak, Belawan, Tanjung Emas, Panjang, Makassar, Banjarmasin, Pontianak, Bitung, Samarinda, dan Palembang), 17 pelabuhan yang memiliki terminal penumpang dan 142 pelabuhan untuk pelayaran perintis/rakyat; (b) pembangunan kapal perintis sebanyak 18 unit; (c) pembangunan fasilitas sistem telekomunikasi pelayaran, antara lain: persiapan *Indonesia Ship Reporting System* (INDOSREP) di Selat Sunda dan Selat Lombok, pembangunan *Vessel Traffic Services* (VTS) di wilayah Selat Malaka, pembangunan *vessel traffic information System* (VTIS) di Teluk Bintuni, Papua Barat, serta pemasangan *automatic identification ship* (AIS) di lima lokasi pelabuhan, yaitu Belawan, Jakarta, Semarang, Surabaya, dan Makassar; (d) pembangunan sarana bantu navigasi pelayaran (SBNP) meliputi 42 unit menara suar, 123 unit rambu suar, dan 100 unit pelampung suar; (e) pengerukan alur/kolam pelabuhan mencapai 17,17 juta m³; dan (f) pengadaan kapal navigasi empat unit.

Paket kebijakan Inpres No. 5 Tahun 2005 tentang Pemberdayaan Industri Pelayaran Nasional telah mampu mendorong peningkatan jumlah armada pelayaran nasional dari 6.041 unit tahun 2005 menjadi 9.064 unit tahun 2009 (kenaikan 50,4 persen). Pada periode yang sama, pangsa pasar armada pelayaran nasional untuk angkutan barang ekspor-impor meningkat dari 3,5 persen (dari total muatan 465,1 juta ton) menjadi 9,0 persen (dari total muatan 546,4 juta ton), sedangkan untuk angkutan laut dalam negeri, pangsa pasar armada kapal nasional meningkat dari 54,0 persen (dari total muatan 187,6 juta ton) menjadi 85,7 persen (dari total muatan 262,3 juta

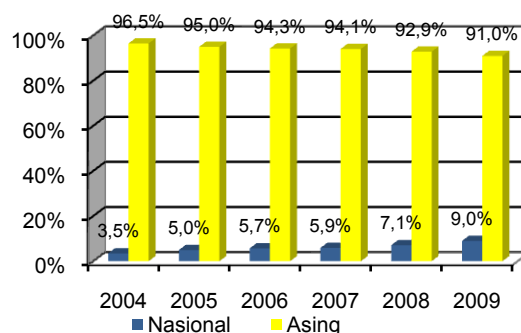
ton).

GAMBAR 5.7: PANGSA PASAR ANGKUTAN LAUT DALAM NEGERI OLEH ARMADA NASIONAL DAN ASING (2005-2009)



Sumber: Ditjen Hubla Dephub, 2009 (diolah)

GAMBAR 5.8: PANGSA PASAR ANGKUTAN LAUT LUAR NEGERI OLEH ARMADA NASIONAL DAN ASING (2005-2009)



**TABEL 5.1
PERKEMBANGAN ANGKUTAN LAUT
PERINTIS 2005-2008**

Tahun	Jumlah Trayek	Alokasi Dana	Barang	Penumpang
		(Rp.Milyar)	(Ton)	(orang)
2004	47	99,8	120.400	565.000
2005	48	135,2	53.224	255.160
2006	52	193,4	151.809	391.069
2007	53	175,1	142.321	330.005
2008	56	206,7	136.309	268.340
2004-2008		810,2	604.063	1.809.574

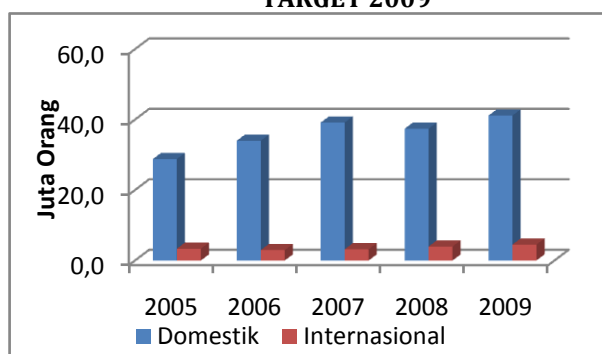
Sumber: Kementerian Perhubungan, 2009 (diolah)

Angkutan barang dan penumpang laut dalam negeri saat ini diselenggarakan baik oleh pemerintah maupun swasta. Pada koridor-koridor yang strategis, pelayanan angkutan laut diselenggarakan oleh operator swasta, sedangkan di luar koridor tersebut, pemerintah memberikan dukungan pelayanan dalam bentuk PSO dan pelayanan angkutan perintis. Tabel 5.1 menjelaskan produksi angkutan penumpang dan barang yang dilayani oleh angkutan perintis sejak tahun 2005—2008, sedangkan penyediaan PSO melalui PT PELNI bagi penumpang kelas ekonomi mencapai 23 unit kapal yang beroperasi di seluruh Nusantara.

Hasil yang telah dicapai dalam pembangunan transportasi udara, antara lain: (a) pengembangan 14 bandar udara pada daerah rawan bencana dan daerah perbatasan agar mampu melayani pesawat udara sejenis F-27 atau Hercules C-130; (b) rehabilitasi dan pemeliharaan fasilitas landasan 2.881.925 m², fasilitas terminal 17.842 m², fasilitas bangunan 124.083 m², dan fasilitas keselamatan penerbangan 77 paket; (c) pembangunan 15 bandara yang melayani penerbangan umum, di antaranya bandara Dobo, Saumlaki Baru, Seram Bagian Timur, Namniwel, Sam Ratulangi-Manado, Pengganti Dumatubun—Langgur, Waghete Baru dan Muara Bungo, Bandara Internasional Minangkabau, Abdurahman Saleh—Malang, Blimbingsari-Banyuwangi, Seko, Rampi, dan Hadinotonegoro Jember; (d) pembangunan bandara Medan Baru, Hasanuddin Makassar, Lombok Baru, serta terminal tiga Bandara Soekarno Hatta; (e) pembangunan dan peningkatan bandara di daerah perbatasan, terpencil, dan rawan bencana sebanyak 12 lokasi di Rembele, Silangit, Sibolga, Enggano, Rote, Ende, Naha, Manokwari, Sorong, Melongguane, Nunukan, dan Haliwen; serta (i) pemberian subsidi operasi angkutan udara perintis untuk 96 rute di 15 provinsi.

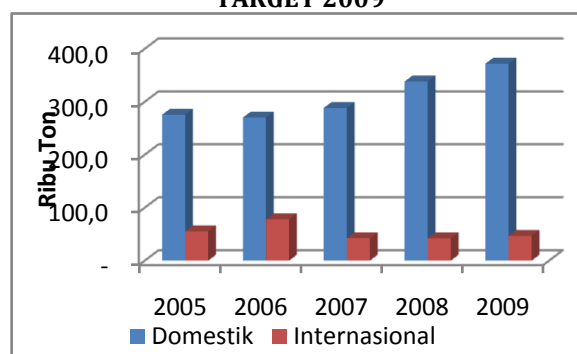
Dalam kurun waktu 2005--2008, kinerja pelayanan transportasi udara terus mengalami peningkatan. Jumlah armada angkutan udara niaga berjadwal nasional yang beroperasi meningkat dari 214 unit menjadi 489 unit; jumlah penumpang pesawat domestik meningkat dari 28,8 juta orang menjadi 37,4 juta orang (29,8 persen); jumlah penumpang pesawat internasional meningkat dari 3,4 juta orang menjadi 3,9 juta orang (17,8 persen). Jumlah tersebut diperkirakan akan terus mengalami peningkatan yang cukup signifikan, yang sampai dengan April 2009 jumlah penumpang domestik mencapai 41,1 juta orang dan penumpang internasional mencapai 4,5 juta orang, sedangkan angkutan barang sampai dengan April 2009 mencapai 372,1 ribu ton dan angkutan barang internasional mencapai 46,7 ribu ton. Peningkatan jumlah penumpang baik domestik maupun internasional tersebut selaras dengan peningkatan jumlah wisatawan baik domestik maupun internasional. Jumlah wisatawan mancanegara mencapai 6,42 juta orang dengan devisa mencapai US\$ 7,37 miliar. Dari total wisatawan mancanegara tersebut, hampir 67,5 persen menggunakan transportasi udara. Oleh karena itu, untuk menarik wisatawan mancanegara, selain promosi tempat daerah tujuan wisata dan jaminan keamanan di daerah tersebut, diperlukan adanya jaminan keselamatan penerbangan di wilayah udara Indonesia sesuai dengan standar keselamatan penerbangan Internasional yang telah ditetapkan oleh ICAO (International Civil Aviation Organization).

GAMBAR 5.9: PRODUKSI ANGKUTAN PENUMPANG UDARA 2005-2008 DAN TARGET 2009



Sumber: Departemen Perhubungan, 2009 (diolah)

GAMBAR 5.10: PRODUKSI ANGKUTAN BARANG UDARA 2005-2008 DAN TARGET 2009



Sumber: Departemen Perhubungan, 2009 (diolah)

Pembangunan prasarana penunjang transportasi mencakup pembangunan pencarian dan penyelamatan (*search and rescue/SAR*), pendidikan dan pelatihan transportasi, serta penelitian dan pengembangan transportasi. Pembangunan SAR yang dilakukan tahun 2005—2008 meliputi: pengadaan 16 unit *rescue boat* ukuran 36 m, 25 unit *rescue truck*, 4 unit *rescue hoist*, *hydraulic rescue tool* 5 set, *rescue car* 57 unit dan prasarana penunjang operasional lainnya. Pembangunan pendidikan dan pelatihan transportasi meliputi: (a) pembangunan balai diklat kepelautan di NAD, Sorong, dan Ambon; (b) pembangunan *Maritime Education and Training Improvement* (METI); (c) pengembangan STT Transportasi Darat di Makassar dan NAD; (d) pengembangan STPI Curug menuju *center of excellence* dan Program *Pilot commercial* (PC-200); (e) pengadaan fasilitas penunjang diklat dan pembangunan/peningkatan prasarana diklat; (f) perbaikan/perawatan sarana dan prasarana diklat; serta (g) peningkatan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia. Di samping itu, telah dilakukan kegiatan penelitian dan pengembangan berupa penelitian/studi dan telaahan/kajian yang sifatnya lintas sektoral, manajemen transportasi multimoda, transportasi darat, laut, dan udara.

5.1.3 Perumahan Dan Permukiman

Dalam rangka pemenuhan hak dasar untuk tempat tinggal dan lingkungan yang layak sesuai dengan UUD 1945 Pasal 28H, pemerintah telah memfasilitasi penyediaan perumahan bagi masyarakat berpendapatan rendah serta memberikan dukungan penyediaan prasarana dan sarana dasar permukiman, seperti air minum, air limbah, persampahan dan drainase.

TABEL 5.2. PEMBANGUNAN PERUMAHAN 2005-2009

No	Pembangunan Perumahan	Jumlah
1	Pembangunan rumah baru layak huni	1.331.580 unit
2	Pembangunan Rumah Susun Sederhana Sewa	37.709 unit
3	Fasilitasi pembangunan Rumah Susun Sederhana Milik	6.716 unit
4	Fasilitasi pembangunan/perbaikan perumahan swadaya	3.659.037 unit

Sumber: Kementerian Negara Perumahan Rakyat, 2009

Berdasarkan status penguasaan tempat tinggal, pada tahun 2007 terdapat 78,22 persen rumah tangga yang menempati rumah milik sendiri, sisanya 21,78 persen menempati rumah bukan milik sendiri seperti kontrak, sewa, dan rumah orang tua. Proporsi rumah tangga yang menempati rumah bukan milik sendiri di perkotaan mencapai 32,98 persen jauh lebih tinggi dibandingkan dengan di perdesaan yang sebesar 13,28 persen. Berdasarkan kualitas fisik bangunan, pada tahun 2007 proporsi rumah tangga yang menempati rumah berlantai bukan tanah mencapai 86,29 persen; beratap bukan daun sebanyak 98,8 persen; dan berdinding permanen sebesar 87,6 persen. Selain itu, berdasarkan kondisi bangunan tempat tinggal, rumah tangga yang menempati rumah dengan kondisi baik mencapai 45,94 persen, kondisi sedang 43,94 persen, kondisi rusak 9,25 persen, dan kondisi rusak berat 0,87 persen. Sekalipun telah dilakukan berbagai upaya peningkatan kualitas lingkungan permukiman, masih terdapat permukiman kumuh seluas 57.800 ha pada akhir tahun 2009. Sementara itu, ditinjau dari aspek kepastian jaminan bermukim, rumah tangga yang menempati rumah milik sendiri dan telah didukung oleh bukti hukum tanah berupa sertifikat bank dari Badan Pertanahan Nasional (BPN), girik, maupun akta jual beli mengalami peningkatan dari 74,49 persen pada tahun 2004 menjadi 77,94 persen pada tahun 2007.

Upaya pemerintah untuk meningkatkan ketersediaan sumber pembiayaan perumahan dilakukan, antara lain, melalui penerbitan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2005 yang direvisi dengan Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pembiayaan Sekunder Perumahan yang mendukung dan memfasilitasi operasionalisasi pasar sekunder pembiayaan perumahan. Sebagai pendukung, pemerintah telah membentuk PT. Sarana Multigriya Finansial (PT. SMF) berdasarkan PP Nomor 5 Tahun 2005 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Pembiayaan Sekunder Perumahan.

Ketersediaan sarana dan prasarana dasar permukiman berupa air minum dan sanitasi secara merata dan berkelanjutan turut menentukan tingkat kesejahteraan masyarakat. Pada tahun 2006, proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap sistem perpipaan (PDAM) mencapai 18,38 persen dan akses terhadap sistem



nonperpipaan terlindungi sebesar 43,57 persen. Penyediaan air minum berbasis masyarakat yang berpedoman pada Kebijakan Nasional Pembangunan Air Minum dan Kesehatan Lingkungan Berbasis Masyarakat (AMPL-BM) telah berkembang pesat didukung pendanaan bank pemerintah maupun pihak lain, seperti lembaga donor, lembaga swadaya masyarakat (LSM), swasta (investasi langsung maupun *Corporate Social Responsibility*) dan masyarakat. Peningkatan kualitas perencanaan dilakukan melalui fasilitasi pemerintah daerah dalam mengimplementasikan Kebijakan Nasional AMPL-BM. Restrukturisasi hutang PDAM serta penyusunan beberapa peraturan pendukung guna mempercepat pembangunan prasarana dan sarana air minum juga telah dilaksanakan.

Untuk pembangunan air limbah, proporsi rumah tangga yang terlayani dengan sistem pengolahan setempat dan sistem terpusat skala komunal pada tahun 2006 secara nasional mencapai 69,3 persen (81,8 persen di perkotaan dan 60 persen di perdesaan). Pencapaian tersebut, antara lain, merupakan hasil dari kegiatan pembangunan jaringan dan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) komunal di 217 kota/kabupaten. Selama periode 2004—2009 pembangunan sistem air limbah terpusat skala kota juga telah dilakukan di kota Denpasar, yang telah menyumbang pada proporsi rumah tangga yang terlayani dengan sistem air limbah terpusat skala kota menjadi 1,65 persen. Dari sisi perencanaan, tengah dikembangkan penyusunan Strategi Sanitasi Kota (SSK) agar pemerintah daerah memiliki dasar bagi pembangunan sanitasi bagi daerahnya masing-masing.

Untuk pengelolaan persampahan, rata-rata timbulan sampah (2006) mencapai 74 juta ton/tahun. Upaya pengurangan volume timbulan sampah melalui penerapan konsep *reduce, reuse and recycle* (3R) terus digalakkan oleh masyarakat dan pemerintah untuk membatasi laju timbulan sampah hingga mencapai 20,63 persen yang terangkut. Jumlah tempat pemrosesan akhir (TPA) yang menerapkan *sanitary landfill* mencapai 10 TPA; dan yang menerapkan *controlled landfill* sebanyak 55 TPA. Pada tahun 2008 telah diberlakukan UU Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah yang mewajibkan seluruh TPA dikelola secara *sanitary landfill* sehingga diharapkan terjadi peningkatan kualitas layanan pengelolaan sampah. Sementara itu, proporsi rumah tangga yang telah terlayani saluran drainase dengan kondisi berfungsi baik/mengalir lancar mencapai 52,83 persen, kondisi saluran mengalir dengan lambat/tergenang sebesar 14,49 persen; dan 32,68 persen rumah tangga tanpa saluran drainase.

5.1.4 Komunikasi Dan Informatika

Dalam upaya menciptakan masyarakat informasi Indonesia, pemerintah mengambil tiga langkah utama, yaitu: (a) meningkatkan ketersediaan dan kualitas informasi; (b) menjamin kelancaran arus informasi; dan (c) mendorong pemanfaatan informasi untuk kegiatan yang produktif. Terkait dengan hal tersebut, ketersediaan sarana dan prasarana serta layanan komunikasi dan informatika yang memadai, baik jumlah akses, kapasitas, kualitas, jangkauan, maupun tarif layanan, merupakan

persyaratan utama sebagai alat komunikasi serta sebagai sarana dan prasarana ekonomi yang mampu menghasilkan peluang ekonomi. Dalam periode tahun 2005-2009, pembangunan difokuskan pada upaya reformasi penyelenggaraan komunikasi dan informatika, pembangunan sarana dan prasarana pos dan telematika yang meliputi pos, telekomunikasi, informatika, dan penyiaran, serta pengembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).

Saat ini, telah dibangun fondasi kuat dalam pelaksanaan agenda reformasi subbidang komunikasi dan informatika di antaranya melalui: (a) pengesahan UU No. 38 Tahun 2009 tentang Pos dan penyusunan RUU Multimedia (Konvergensi Telematika) sebagai pembaharuan UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi dan UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran; (b) pengakhiran bentuk duopoli pada penyelenggaraan telekomunikasi sambungan langsung internasional (SLI) dan sambungan langsung jarak jauh (SLJJ), masing-masing pada tahun 2007 dan 2008; (c) perkuatan Komite Regulasi Telekomunikasi Indonesia sebagai bagian dari Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) yang merupakan regulator di sektor telekomunikasi; (d) implementasi interkoneksi berbasis biaya yang menjamin kepastian dan transparansi penyediaan dan pelayanan antarpenyelenggara telekomunikasi sehingga dapat menghilangkan hambatan (*barrier to entry*) dan mendorong penurunan tarif seluler hingga 90 persen dari termahal di Asia (US\$ 0,15/min pada 2005) menjadi termurah (US\$ 0,015/min pada 2008); serta (e) penataan ulang industri penyiaran melalui pengelompokan penyelenggara penyiaran menjadi Lembaga Penyiaran Publik (LPP), Lembaga Penyiaran Swasta, Lembaga Penyiaran Berlangganan, dan Lembaga Penyiaran Komunitas.

Pada agenda pembangunan sarana dan prasarana pos dan telematika, telah dilakukan, antara lain: (a) penyediaan jasa pos di 2.350 kantor pos cabang luar kota setiap tahunnya melalui program *PSO* dan penyediaan jasa telekomunikasi di 24.051 desa dan jasa akses internet di 70 desa melalui program *Universal Service Obligation* (USO); (b) pemberian izin penyelenggaraan secara kompetitif untuk penyelenggaraan telekomunikasi sambungan bergerak generasi ketiga (3G), SLJJ, SLI, dan akses nirkabel pita lebar (*broadband wireless access*); (c) fasilitasi pembangunan jaringan tulang punggung (*backbone*) telekomunikasi nasional serat optik Palapa Ring di wilayah timur Indonesia; (d) penyelesaian proyek pengembangan sarana dan prasarana penyiaran RRI di 138 kabupaten/kota *blank spot* yang tersebar di 28 provinsi; (e) pembangunan pemancar TVRI di 27 lokasi terpencil, perbatasan, dan *blank spot* melalui proyek *Improvement of TV Transmitting Stations Phase-I*; serta (f) dimulainya migrasi sistem penyiaran *terrestrial* dari *analog* ke digital melalui penetapan *Digital Video Broadcasting* (DVB) sebagai standar penyiaran TV digital dan *Digital Audio Broadcasting* (DAB) sebagai standar penyiaran radio digital yang dilanjutkan dengan uji coba TV digital *free to air terrestrial* dan *mobile TV*.

Adapun terkait dengan agenda pemanfaatan dan pengembangan TIK telah dilakukan antara lain: (a) penyediaan jasa akses internet di antaranya melalui *Community Access Point* (CAP) di 65 lokasi, *Mobile CAP* (MCAP) di 40 lokasi, dan warung

masyarakat informasi; (b) pembentukan Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional melalui Keputusan Presiden (Keppres) No. 20 tentang Tahun 2006; (c) pengesahan UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; (d) penyusunan RUU *Cyber Crime* dan RUU Ratifikasi *Convention on Cyber Crime*; (e) penandatanganan nota kesepakatan oleh 18 kepala Kementerian/Lembaga (K/L) dalam acara *Indonesia Go Open Source (IGOS) Summit 2* sebagai bentuk komitmen dalam memajukan pengembangan *open source software (OSS)* nasional; serta (f) penyelesaian proyek percontohan *e-government* di Batam dan *e-local government* di Minahasa Selatan, Kalimantan Timur, Magelang, dan Solok.

Pencapaian pertumbuhan teledensitas *fixed line* (termasuk *fixed wireless access/FWA*), seluler, dan pengguna internet ditunjukkan seperti pada (Tabel 5.3). Di sektor penyiaran, jangkauan penyiaran *terrestrial* radio publik (LPP RRI) terhadap populasi mengalami peningkatan yaitu dari 66 persen menjadi 83 persen, sedangkan televisi publik (LPP TVRI) menurun tajam yaitu dari 81 persen menjadi 36 persen.

TABEL 5.3
TELEDENSITAS AKSES TELEKOMUNIKASI INDONESIA
TAHUN 2004 - 2008 (PERSEN)

	2004	2005	2006	2007	2008
Telepon Tetap*	4,79	6,16	6,67	8,68	11,49
Telepon Bergerak	14,02	21,44	28,73	41,52	61,72
Pengguna Internet	5,61	7,18	7,18	6,51	11,3

*Telepon tetap terdiri dari *fixed line (Public Switched Telephone Network* atau PSTN) dan FWA

Sumber: *International Telecommunications Union (ITU)*, 2007 (internet) dan Depkominfo, 2008 (telepon)

5.1.5 Energi dan Ketenagalistrikan

Potensi sumber daya energi Indonesia cukup beragam baik berbasis fosil maupun berbasis non fosil, namun ketersediaannya relatif tidak terlalu besar baik dibandingkan dengan potensi yang ada di negara-negara lainnya. Oleh karena itu perlu adanya kearifan dalam pengembangan dan pemanfaatannya.

TABEL 5.4
POTENSI ENERGI FOSIL DAN NON FOSIL TAHUN 2008

Energi Fosil	Sumber Daya	Cadangan	Produksi	RASIO CAD/PRO (TAHUN)*
Minyak Bumi	56,6 Miliar barel	8,2 miliar ton	357 juta barel	23
gas Bumi	334,5 TSCF	170 TSCF	2,7 TSCF	63
Batubara	104,8 miliar ton	18,8 miliar ton	229,2 juta ton	82
Coal Bed Methane (CBM)	453 TSCF	-		-
Energi NonFosil	Sumber Daya			KAPASITAS TERPASANG
Tenaga Air	75.679 MW (e.q. 845 juta SBM)			4.200 MW
Panas Bumi	27.510 MW (e.q. 219 juta SBM)			1.052 MW
Mini/Mikro Hidro	500 MW			86,1 MW
Biomass	49.810 MW			445 MW
Tenaga Surya	4,80 kwh/m2/hari			12,1 MW
Tenaga Angin	9.290 MW			1,1 MW
Uranium	3.000 MW (e.q. 24.112 ton untuk 11 tahun *)			30 MW

Sumber: Rancangan *Blue Print* Pengelolaan Energi nasional 2010-2025, Th. 2009

TABEL 5.5
**PROSENTASE POTENSI ENERGI FOSIL INDONESIA
TERHADAP CADANGAN DUNIA TAHUN 2008**

No	Minyak Bumi	Batubara	Gas Bumi
1	Arab Saudi (21%)	Amerika Serikat (28,9%)	Federasi Rusia (23,4%)
2	Iran (10,9%)	Federasi Rusia (19,0%)	Iran (16,0%)
3	Irak (9,1%)	Cina (9,2%)	Qatar (13,8%)
4	Kuwait (8,1%)	Australia (9,2%)	Turkmenistan (4,3%)
5	venezuela (7,9%)	India (7,1%)	Arab Saudi (4,1%)
6	Uni Emirat Arab (7,8%)	Ukraina 4,1%)	Amerika Serikat (3,6%)
	Indonesia (0,3%)	Indonesia (0,5%)	Indonesia (1,7%)

Sumber: KESDM, 2009.

Pengelolaan energi di Indonesia saat ini berlandaskan pada UU No. 30 Tahun 2007 tentang Energi yang mengubah pola pengelolaan energi dari semula hanya terfokus di sisi penyediaan, saat ini juga memfokuskan pada sisi permintaan di antaranya melalui upaya konservasi dan diversifikasi. Beberapa perundang-undangan

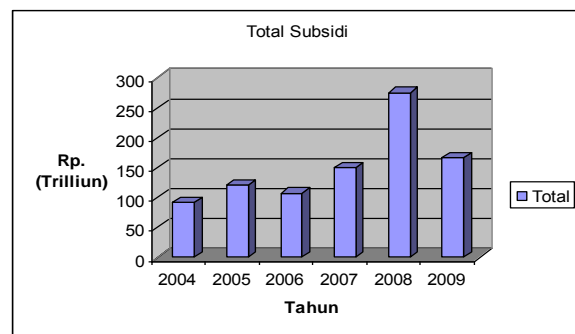
lainnya sebagai landasan bagi penyediaan dan pemanfaatan energi juga telah diterbitkan, yaitu UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, UU No. 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi, dan UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Terkait dengan pembangunan ketenagalistrikan, telah disahkan UU No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan yang merupakan pengganti UU No. 15 tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan. Beberapa hal baru yang diatur oleh UU Ketenagalistrikan adalah kemungkinan diterapkannya tarif regional, peningkatan peran swasta, kerjasama (jual beli listrik) antarnegara, dan PT. PLN tidak lagi sebagai Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan (PKUK).

Sampai saat ini pengusaha energi masih didominasi oleh teknologi dan modal asing dimana pemanfaatan barang dan jasa produksi dalam negeri terus diupayakan melalui regulasi dan pemberdayaan guna meningkatkan tingkat komponen dalam negeri (TKDN). Rata-rata tingkat kandungan komponen dalam negeri untuk pembangunan ketenagalistrikan masih rendah di sisi pembangkitan dan transmisi. Selain itu, pengusaha energi juga diwarnai oleh kebijakan subsidi harga BBM dan listrik di dalam negeri, yang untuk BBM tertentu dan tarif dasar listrik (TDL) masih ditentukan oleh pemerintah. Subsidi energi (BBM dan Listrik) setiap tahun meningkat, bahkan pada tahun 2008 mencapai lebih dari Rp. 200 Triliun.

Kebijakan TDL belum mencerminkan harga yang berkeadilan karena subsidi pemerintah yang sangat besar (akibat selisih antara BPP dengan TDL) dinikmati oleh semua golongan masyarakat baik yang mampu maupun yang tidak mampu. Besaran subsidi listrik terutama dipengaruhi oleh harga bahan bakar (terutama minyak).

**GAMBAR 5.11 : BESARNYA SUBSIDI
TAHUN 2004-2009**



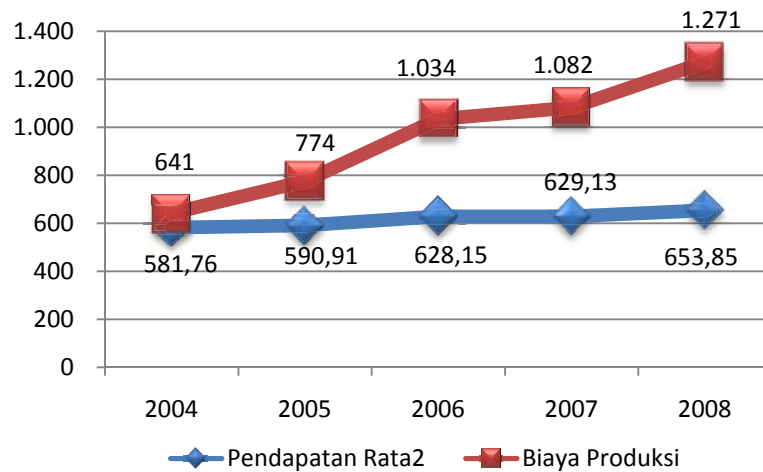
Sumber: fiscal.depkeu.go.id, 2009

**TABEL 5.6 PERKEMBANGAN SUBSIDI SERTA
BIAYA BAHAN BAKAR DAN PELUMAS**

	2004	2005	2006	2007	2008
Subsidi (Rp. Triliun)	3,47	12,51	32,91	36,60	78,58
Biaya Bahan Bakar&Pelumas (Rp. Triliun)	24,49	37,36	63,40	65,56	107,78

Sumber: PT. PLN (Persero) diolah, 2009

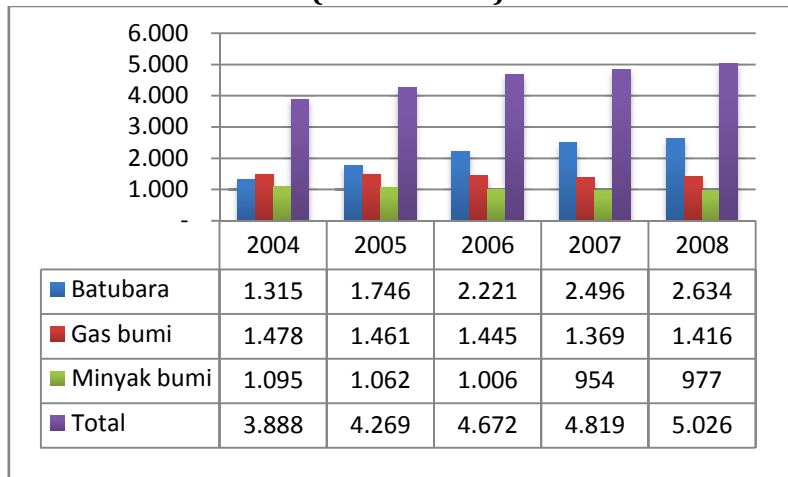
**GAMBAR 5.12 :
PENDAPATAN RATA-RATA DAN BIAYA PRODUKSI PER KWH**



Sumber: PT. PLN (Persero), 2009

Selain itu, kebijakan harga listrik tersebut tidak mampu mendukung pengembangan investasi jangka panjang oleh PT. PLN, yang pendapatan atas penjualan listrik rata-rata hanya sekitar Rp. 653,85 per kWh. Sementara itu, di sisi penyediaan, pada tahun yang sama, biaya pokok penyediaan (BPP) listrik rata-rata mencapai Rp. 1.271,04 per kWh.

**GAMBAR 5.13 :
PRODUKSI ENERGI FOSIL
(RIBU BOEPD)**

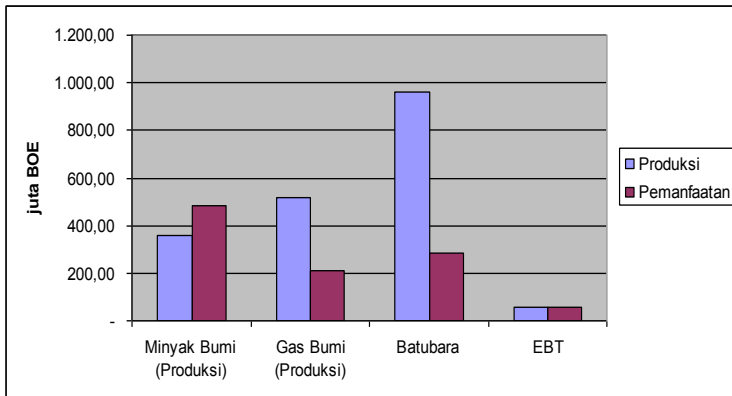


Sumber: KESDM, 2009

Dalam perkembangannya, penyediaan energi terutama produksi energi fosil terus meningkat, sedangkan Energi Baru Terbarukan (EBT) masih belum menunjukkan perkembangan yang signifikan. Pada tahun 2008, produksi energi fosil dengan total sebesar 5.206 ribu BOEPD masih didominasi oleh Batubara sebesar 52,4 persen, diikuti gas bumi 28,2 persen, dan minyak bumi 19,4 persen.

Pola pemanfaatan energi primer di dalam negeri masih didominasi oleh minyak bumi sebesar 46,7 persen, gas bumi 20,6 persen, batubara 27,4 persen, dan EBT 5,3 persen. Demikian pula pemanfaatan energi akhirnya. Total konsumsi energi final yang mencapai 805,6 juta SBM masih didominasi oleh BBM sebesar 47,1 persen.

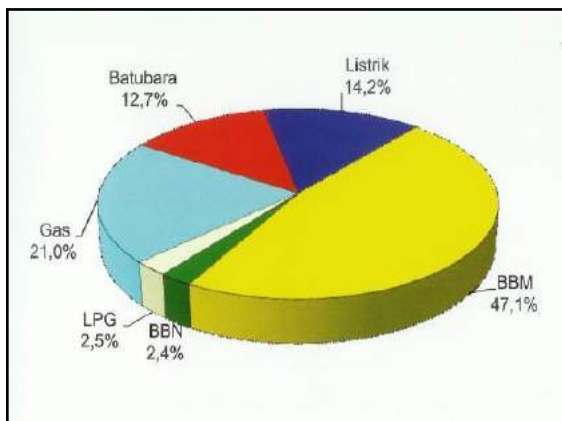
**GAMBAR 5.14
PRODUKSI ENERGI DAN PEMANFAATAN
(RIBU BOEPD) TAHUN 2008**



Sumber: diolah dari KESDM, 2009

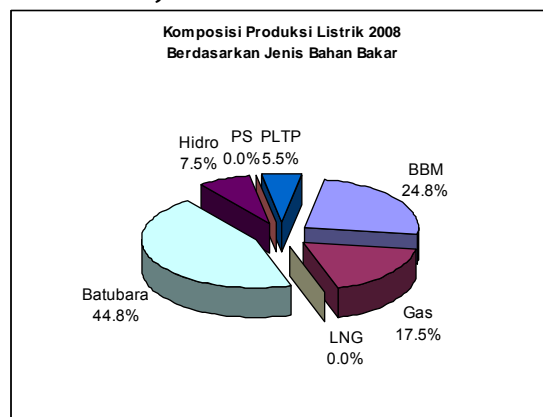
Sementara itu pemanfaatan energi untuk pembangkit listrik juga masih didominasi oleh BBM. Sampai dengan tahun 2008 komposisi produksi listrik berdasarkan bahan bakar didominasi oleh Batubara sebesar 45 persen dan BBM sebesar 25 persen. Sementara itu, pada tahun yang sama, PT. PLN membelanjakan 56 persen dari total beban usaha untuk membeli bahan bakar minyak.

GAMBAR 5.15 KOMPOSISI KONSUMSI ENERGI FINAL 2008



Sumber: KESDM, 2009

GAMBAR 5.16 KOMPOSISI PRODUKSI LISTRIK 2008 BERDASARKAN JENIS BAHAN BAKAR



Sumber: Data diolah dari RUPTL 2009-2018 PT. PLN.

Dengan semakin terbatasnya sumber energi fosil, dilakukan upaya diversifikasi penyediaan dan pemanfaatan energi agar bauran energi menjadi lebih optimal. Hal tersebut juga sejalan dengan upaya pengurangan dampak perubahan iklim (*climate change*) yang ada sehingga diperlukan untuk segera memanfaatkan energi alternatif secara bertahap dan berorientasi pasar.

TABEL 5.7
KAPASITAS DAN PRODUKSI ENERGI ALTERNATIF

URAIAN	SATUAN	2004	2005	2006	2007	2008
Panas Bumi	KW	800.000,0	800.000,0	800.000,0	1.042.000,0	1.052.000,0
PLTS	KW	-	110,3	1.629,3	3.658,3	5.522,3
PLTB	KW	-	80,0	320,0	835,0	1.015,0
PLTMH & Pikohidro	KW	-	214,0	928,0	2.092,0	3.027,0
TOTAL	KW	800.000,0	800.404,3	802.887,3	1.048.565,3	1.061.564,3
URAIAN	SATUAN	2004	2005	2006	2007	2008
Biofuel (Per Tahun)	Ribu KL	3,3	122,5	471,5	1.722,2	2.558,7
- Bio Diesel	Ribu KL	0,8	120,0	456,6	1.550,0	2.329,1
- Bio etanol	Ribu KL	2,5	2,5	12,5	135,0	192,4
- Bio Oil	Ribu KL			2,4	37,2	37,2

Sumber : KESDM, 2009

Upaya pengembangan dan pemanfaatan energi alternatif berbasis batubara saat ini terus diupayakan melalui pengembangan teknologi *upgraded brown coal* (UBC), pencairan batubara (*coal liquefaction*) dan pengembangan *coal bed methane* (CBM). Upaya pengembangan tersebut, di antaranya adalah: (a) melanjutkan pengembangan teknologi UBC dari *pilot plant* menuju *demo plant* UBC di Palimanan Cirebon guna mendukung pemanfaatan batubara dari 5 ton/hari menjadi kapasitas 1.000 ton/hari pada tahun 2008; (b) untuk pencairan batubara direncanakan akan dibangun beberapa pabrik pencairan batubara yang nantinya akan memberikan sumbangan yang berarti kepada pengurangan kebutuhan BBM di dalam negeri; serta (c) melanjutkan proyek percontohan pengembangan CBM di Sumatra Selatan.

TABEL 5.8
PENCAPAIAN BAURAN DAN
EFISIENSI ENERGI TAHUN 2008

ITEM	SATUAN	CAPAIAN
1. Bauran Energi Primer (total 1.006,53 juta SBM)		
- Minyak Bumi	%	48,3
- Gas Bumi	%	28,6
- Batubara	%	18,8
- EBT	%	4,3
2. Intensitas Energi	TOE/juta USD	480
3. Elastisitas Energi		1,71

Sumber: Diolah dari KESDM, 2009

Selain itu, dilakukan upaya konservasi dan efisiensi energi yang lebih intensif. Pemerintah telah melaksanakan program konservasi energi, dan dalam pelaksanaannya telah dilakukan audit energi untuk kalangan industri dan gedung bertingkat. Pada sisi konsumen, pemerintah telah melaksanakan program hemat energi, program ini mencakup labelisasi peralatan rumah tangga yang hemat energi.

Peningkatan kualitas dan kapasitas sarana dan prasarana minyak dan gas bumi nasional menunjukkan adanya perkembangan, tetapi beberapa di antaranya mengalami keterlambatan dari rencana semula. Hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai di antaranya meliputi: (a) pembangunan pipa transmisi gas bumi Sumatra Selatan – Jawa Barat tahap I dan tahap II dengan total investasi US\$ 1,508 juta yang diharapkan akan mampu mengalirkan gas sebesar 1700 MMSCFD; (b) pembangunan wilayah distribusi gas bumi di Jawa Bagian Barat melalui *Domestic Gas Market Development Project* dengan total investasi sebesar US\$ 80 juta; (c) penerbitan 56 ijin usaha kegiatan hilir, dengan komitmen investasi sebesar US\$ 653,9 juta; serta (d) penancangan program percepatan substitusi BBM dengan memanfaatkan LPG, BBG, dan briket batubara.

TABEL 5.9
PENCAPAIAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA
MINYAK DAN GAS BUMI 2008

ITEM	SATUAN	CAPAIAN
Kilang Minyak Bumi	MBSD	1,162
Kilang LPG	Juta ton/thn	4,18
Kilang LNG	MTPA	33,55
LNG Receiving Terminal	MMSCFD	--
Jaringan Gas Kota	Sambungan	81,294
Jaringan Transmisi Pipa Gas Bumi	Km	2,152

Sumber: Diolah dari KESDM, 2009

Selain itu, terdapat rencana pembangunan prasarana gas bumi yang belum berjalan, misalnya ruas transmisi Kalimantan—Jawa dan ruas trans-Jawa, yang erat kaitannya dengan proses bisnis yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Dampaknya adalah jaringan trans Jawa juga ikut tertunda. Adapun untuk jaringan gas kota pada tahun 2009 akan dibangun di dua kota, yaitu Surabaya dan Palembang.

Sampai dengan tahun 2008, pembangunan ketenagalistrikan yang dilaksanakan melalui berbagai upaya peningkatan kapasitas pembangkit tenaga listrik telah mencapai kondisi sebagai berikut: (a) kapasitas terpasang pembangkit sebesar 29.885 MW, terdiri atas pembangkit PT PLN (Persero) sebesar 24.925 MW (83,40 persen), listrik swasta 4.044 MW (13,53 persen), dan Pembangkit Terintegrasi (PPU) 916 MW (3,07 persen); (b) bauran energi untuk pembangkitan tenaga listrik: batubara sebesar 38 persen, gas 16 persen, BBM 33 persen, panas bumi 3 persen, dan hidro (PLTA) 10 persen; serta (c) *reserve margin* rata-rata 25 persen. Penyediaan tenaga listrik di sisi penyaluran telah menghasilkan: (a) total panjang jaringan transmisi yang dibangun, yaitu tegangan 500 kV adalah 5.048 kms, tegangan 275 kV adalah 781 kms, tegangan 150 kV adalah 22.702 kms, dan tegangan 70 kV adalah 4.619 kms; (b) rasio elektrifikasi dan rasio desa berlistrik masing-masing sekitar 66,3 persen dan 96,8 persen¹; serta (c) tingkat *losses* sekitar 11,5 persen, keandalan sistem ditandai oleh *system average interruption duration index* (SAIDI)² sebesar 27,01 jam/customer dan *system average interruption frequency index* (SAIFI)³ sebesar 13,85 kali/customer.

¹ Perkiraan realisasi tahun 2009

² SAIDI merupakan perbandingan antara jumlah lama gangguan (jam) dengan total pelanggan (*customer*)

³ SAIFI merupakan perbandingan antara jumlah kejadian gangguan (kali) dengan total pelanggan (*customer*)

5.1.6 Penanggulangan Semburan Lumpur Sidoarjo

Semburan lumpur panas di Sidoarjo sejak tahun 2006 telah berdampak terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat di sekitarnya. Volume lumpur yang keluar terus meningkat, dari sekitar 5.000 m³/hari pada bulan Juni 2006 menjadi 100.000 – 120.000 m³/hari pada tahun 2007, dan belum ada tanda-tanda akan berhenti dalam waktu dekat. Sampai saat ini, semburan lumpur telah meluas dan menggenangi 12 desa/kelurahan, yaitu Siring, Jatirejo, Mindi, Renokenongo, Kedungbendo, Gempolsari, Kedungcangkring, Pejarakan, Besuki, Glagaharum, Ketapang, dan Kalitengah. Sebanyak lebih kurang 14.000 KK/40.000 jiwa di 12 desa/kelurahan tersebut menjadi korban luapan lumpur. Hingga saat ini masih terjadi penurunan muka tanah (*subsidence*) di pusat semburan akibat deformasi geologi sebesar 5 - 10 cm/minggu yang belum dapat diprediksi sampai kapan akan terjadi.

Sesuai dengan Keputusan Tetap Mahkamah Agung RI No. 2710K/Pdt/2008 Tanggal 3 April 2009, ditetapkan bahwa semburan lumpur di Sidoarjo terjadi akibat fenomena alam dan bukan kesalahan PT Lapindo Brantas. Melalui Perpres No. 40 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo, ditetapkan bahwa:

1. biaya upaya penanggulangan semburan lumpur, pengaliran lumpur ke Kali Porong, penanganan infrastruktur, termasuk infrastruktur penanganan luapan lumpur di Sidoarjo, dibebankan kepada APBN dan sumber dana lainnya yang sah;
2. biaya tindakan mitigasi yang dilakukan oleh Badan Pelaksana BPLS untuk melindungi keselamatan masyarakat dan infrastruktur dibebankan kepada APBN;
3. penambahan wilayah 9 RT di 3 desa (Siring Barat, Jatirejo dan Mindi) yang tidak layak huni ke dalam wilayah penanganan luapan semburan lumpur di luar peta area terdampak; dan
4. PT. Lapindo tetap bertanggung jawab terhadap penanganan masalah sosial dalam Peta Area Terdampak. Pembayaran dilakukan secara bertahap dengan pembayaran sebesar 20% dibayarkan di muka dan sisanya sebesar 80% dibayarkan paling lambat sebulan sebelum masa kontrak rumah 2 (dua) tahun berakhir.

5.2 Permasalahan Dan Sasaran Pembangunan Bidang Sarana Dan Prasarana

Kondisi jaringan sarana dan prasarana di Indonesia yang meliputi jaringan prasarana dan sarana jalan, kereta api, transportasi laut dan udara, jaringan pengairan dan irigasi, jaringan listrik dan jaringan telekomunikasi dan informatika belum memadai dalam mendukung tingkat daya saing global yang tinggi. Laporan *World Economic Forum* 2008-2009 menunjukkan bahwa kurangnya ketersediaan sarana dan



prasarana merupakan permasalahan kedua terbesar, setelah ketidakefisienan birokrasi pemerintah, bagi pelaku bisnis dalam melakukan usaha di Indonesia. Diukur dari sisi kualitas sarana dan prasarana secara keseluruhan, Indonesia hanya menempati peringkat ke 96 dari 134 negara yang diteliti. Peringkat tersebut jauh tertinggal dari Malaysia yang menempati peringkat ke 23, Thailand di peringkat ke 29, China di peringkat ke 47, dan Filipina di peringkat ke 92.

Masalah lain yang masih akan dihadapi adalah aksesibilitas dan jangkauan pelayanan terhadap perumahan beserta sarana dan prasarananya yang belum memadai. Upaya pencapaian target millenium development goals (MDG's) pada tahun 2015 masih perlu ditingkatkan untuk mengurangi separuh penduduk yang tidak memiliki akses terhadap air minum dan sanitasi yang aman, serta pengurangan separuh penduduk miskin yang menghuni permukiman kumuh. Diperkirakan pada tahun 2009 jumlah kekurangan rumah (*backlog*) mengalami peningkatan menjadi 7,4 juta, sedangkan pada akhir tahun 2006, akses penduduk terhadap air minum yang aman dan berkelanjutan baru mencapai 52,1 persen dari target sebesar 67 persen. Pelayanan sanitasi dasar telah mencapai 68 persen dari target sebesar 65,5 persen, tetapi pencapaian tersebut belum memperhatikan kualitas pelayanan sanitasi yang aman bagi lingkungan dan kesehatan. Kondisi tersebut diperkirakan akan mengalami stagnansi yang disebabkan oleh kemampuan penyediaan perumahan beserta sarana dan prasarananya yang belum mampu mengimbangi laju pertumbuhan penduduk.

Kendala sarana dan prasarana untuk meningkatkan daya saing perekonomian nasional dan memberikan pelayanan kepada masyarakat secara merata terutama disebabkan oleh kurang tersedia dan terpeliharanya sarana dan prasarana sehingga tidak dapat berfungsi optimal. Hal ini disebabkan oleh kelembagaan, sumberdaya manusia, dan terbatasnya kemampuan pembiayaan pemerintah. Pada saat ini banyak lembaga yang terkait dengan pengelolaan sarana dan prasarana sehingga menyulitkan koordinasi, sedangkan kualitas sumber daya manusia masih rendah. Sementara itu, terkait dengan pembiayaan, investasi sarana dan prasarana saat ini masih jauh dari kebutuhan investasi.

Sasaran umum pembangunan sarana dan prasarana lima tahun ke depan antara lain: (a) meningkatnya kuantitas dan kualitas berbagai sarana dan prasarana penunjang pembangunan, seperti jalan raya, jalan kereta api, pelabuhan laut, bandar udara, sarana dan prasarana listrik, prasarana energi, air minum dan sanitasi, serta sarana dan prasarana informasi dan komunikasi; (b) terjaminnya ketersediaan aksesibilitas masyarakat terhadap jasa pelayanan sarana dan prasarana; serta (c) meningkatnya ketahanan energi terutama diversifikasi energi yang menjamin keberlangsungan dan jumlah pasokan energi di seluruh Indonesia, (d) meningkatnya penggunaan *renewable energy* dan energi yang bersih dan ekonomis; dan meningkatnya efisiensi konsumsi dan penghematan energi baik di lingkungan industri rumah tangga, industri besar dan maupun transportasi.

Secara lebih terinci permasalahan selama kurun waktu 2005—2009 serta sasaran sarana dan prasarana 2010—2014 dapat digambarkan sebagai berikut.

5.2.1 Sumber Daya Air

Pada kurun waktu 5 tahun ke depan, sumber daya air diperkirakan masih menghadapi beberapa permasalahan, antara lain:

Keberlanjutan ketersediaan air menurun. Degradasi Daerah Aliran Sungai (DAS) dan tingginya alih fungsi lahan mengakibatkan menurunnya kemampuan peresapan/ penyimpanan air. Terjadinya perubahan iklim turut mempengaruhi pola distribusi ketersediaan air yang kurang didukung oleh jumlah sarana dan prasarana penampung air yang memadai. Selain itu, kualitas air yang ada semakin menurun akibat tingginya pencemaran air. Ketersediaan air tanah semakin terancam akibat eksploitasi air tanah secara berlebihan, yang juga menimbulkan dampak seperti penurunan muka air tanah, intrusi air laut, serta penurunan permukaan tanah (*land subsidence*) sebagaimana telah terjadi di kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, dan Semarang.

Layanan air baku belum optimal dan merata. Suplai air baku semakin berkurang akibat menurunnya debit pada sumber-sumber air dan tingginya laju sedimentasi pada tampungan-tampungan air, seperti waduk, embung, danau, dan situ. Selain itu, kualitas air semakin rendah akibat tingginya tingkat pencemaran pada sungai dan sumber-sumber air lainnya. Di sisi lain, kebutuhan air baku semakin tinggi akibat pesatnya pertumbuhan penduduk, berkembangnya aktivitas manusia, dan tidak efisiennya pola pemanfaatan air. Hal tersebut tidak diikuti dengan pengembangan teknologi pengolahan dan penyediaan air baku yang efektif dan optimal. Rendahnya ketersediaan prasarana penyedia air baku di perdesaan, daerah terpencil, kawasan perbatasan dan pulau-pulau terdepan menyebabkan tingginya eksploitasi air tanah untuk memenuhi kebutuhan air minum dan kebutuhan pokok sehari-hari (tahun 2007 sekitar 58 persen masyarakat masih mengandalkan air tanah).

Pengembangan dan pengelolaan irigasi/rawa belum optimal. Dari 7,4 juta hektar areal irigasi yang telah dibangun, hanya sekitar 11 persen yang ketersediaan airnya dapat dijamin melalui waduk, sedangkan sisanya masih mengandalkan debit sungai atau mata air (*free intake*). Sekitar 1,37 juta hektar areal irigasi tidak berfungsi optimal akibat bencana alam serta belum lengkapnya sistem jaringan irigasi. Selain itu, alih fungsi lahan pertanian produktif semakin tinggi, mencapai 25 ribu hektar per tahun. Pengembangan lahan rawa sebagai alternatif lahan irigasi baru sekitar 5,4 persen atau sekitar 1,8 juta hektar yang telah dikembangkan dari total potensi seluas 33,4 juta hektar. Di sisi lain, penggunaan air irigasi cenderung boros karena rendahnya efisiensi. Keterbatasan pendanaan serta masih rendahnya kuantitas dan kualitas sumber daya manusia menyebabkan rendahnya kinerja operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi. Selain itu, partisipasi masyarakat petani masih rendah dan kinerja kelembagaan pengelolaan irigasi belum optimal.



Frekuensi dan intensitas bencana banjir, kekeringan dan abrasi pantai meningkat, akibat kerusakan daerah tangkapan air dan perubahan iklim seperti terjadi pada DAS Ciliwung, Citarum dan Bengawan Solo. Tahun 2005 bencana banjir terjadi di 27 provinsi sebanyak 248 kejadian, dan meningkat menjadi 356 kejadian pada tahun 2007. Pada periode yang sama, kegagalan panen akibat banjir meningkat dari 80,38 ribu hektar menjadi 104,8 ribu hektar. Pada daerah perkotaan, seperti Jakarta, Semarang, dan Surabaya, banjir juga disebabkan oleh buruknya sistem drainase mikro dan pembuangan sampah di badan sungai. Penambangan bahan galian golongan C yang tidak terkendali di beberapa sungai memicu terjadinya degradasi dasar sungai serta erosi tebing sungai. Selain itu, perubahan iklim juga turut menyebabkan terjadinya kekeringan, yang pada tahun 2005 seluas 44,8 ribu hektar sawah gagal panen dan meningkat menjadi 63,6 ribu hektar pada tahun 2006. Kenaikan muka air laut juga memicu terjadinya banjir rob/pasang air laut, abrasi pantai, dan gelombang pasang yang mengancam kawasan pantai Indonesia, terutama pada daerah yang menjadi pusat-pusat perekonomian, permukiman, dan industri. Saat ini dari total 95,2 ribu km garis pantai Indonesia, 34 persen di antaranya dalam kondisi kritis.

Kinerja kelembagaan pengelolaan sumber daya air belum optimal. Pelaksanaan pengelolaan sumber daya air masih kurang terpadu, terintegrasi dan berkelanjutan. Koordinasi antarinstansi, antarpemerintahan (pusat, provinsi, kabupaten/kota), dan antarpemilik kepentingan belum optimal akibat pendekatan yang bersifat sektoral dan pembagian urusan/tanggung jawab masih tumpang tindih dan kurang jelas. Fungsi kelembagaan pengelola sumber daya air juga belum optimal karena belum disahkannya peraturan perundangan sebagai acuan operasional. Belum adanya kebijakan tentang hak guna air mengakibatkan tidak terkendalinya perusahaan dan penguasaan sumber air oleh pihak swasta. Selain itu, penegakan hukum terhadap pelanggaran pengelolaan sumber daya air juga masih lemah. Di sisi lain, kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air masih rendah karena kurangnya pemahaman atas fungsi sosial, ekonomi, dan lingkungan dari air. Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah, potensi konflik pengelolaan sumber daya air dapat terjadi akibat ketersediaan air yang tidak merata antarwilayah administrasi.

Ketersediaan, kualitas, serta akses terhadap sistem data dan informasi sumber daya air rendahnya. Sistem data dan informasi sulit untuk diintegrasikan sehingga belum mampu mendukung efektifitas kinerja pengelolaan sumber daya air. Kualitas data dan informasi juga masih belum memenuhi standar. Pertukaran data dan informasi antarinstansi/departemen mengalami banyak hambatan. Selain itu, akses masyarakat terhadap layanan sistem data dan informasi sumber daya air masih sangat rendah.

Sasaran umum pengelolaan sumber daya air lima tahun ke depan secara rinci diuraikan dalam tabel berikut:

TABEL 5.10
SASARAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR 2010-2014

No	Sasaran	Indikator
1	Meningkatnya ketersediaan dan menjaga kelestarian sumber daya air	a. terjaganya ketersediaan air dengan volume 11,5 miliar m ³ ; b. meningkatnya ketersediaan air dengan volume 500 juta m ³ ; c. terjaga dan terlindunginya kelestarian 15 kawasan sumber air
	Terkendalinya bahaya banjir, meningkat dan terjaganya ketersediaan air di Daerah Aliran Sungai Bengawan Solo	a. terbangunnya 7 waduk di DAS Bengawan Solo (Bendo, Gondang, Kresek, Kedung Bendo, Kendang dan Pidekso); b. terlaksananya konservasi di DAS Bengawan Solo (Kali Tirtomoyo dan Kali asin, serta arboretum Bengawan Solo);
2	Meningkatnya layanan prasarana air baku	a. meningkatnya kapasitas layanan air baku dengan kapasitas 43,4 m ³ /det; b. terjaganya layanan prasarana air baku dengan kapasitas 44,8 m ³ /det
3	Meningkatkannya layanan jaringan irigasi/rawa	a. meningkat dan terjaganya layanan irigasi pada areal seluas 2,55 juta hektar; b. meningkat dan terjaganya layanan jaringan rawa pada areal seluas 1,21 juta hektar; c. meningkat dan terjaganya pemanfaatan air tanah untuk irigasi seluas 44,89 ribu hektar d. berkembangnya daerah irigasi dan drainase Jero/Rawa Jero
4	Terlindunginya kawasan prioritas dari daya rusak air akibat banjir, abrasi pantai, dan lahar gunung berapi/sedimen	a. terlindunginya kawasan seluas 48,66 ribu hektar dari bahaya banjir; b. terlindunginya garis pantai sepanjang 80 km dari abrasi pantai; c. terkendalinya 16 juta m ³ lahar/sedimen
	Terselesaikannya pembangunan Banjir Kanal Timur Jakarta untuk mengendalikan dan mengurangi genangan akibat banjir di wilayah Jakarta	a. terselesaikannya pekerjaan konstruksi paket 22 sampai dengan paket 29; b. terbangunnya bangunan akhir/jetty di muara Banjir Kanal Timur (BKT); c. terbangunnya jembatan serta bangunan-bangunan pelengkap BKT lainnya
	Terkendalinya bahaya banjir, di wilayah Daerah Aliran Sungai Bengawan Solo	a. terbangunnya prasarana pengendali banjir (Bendung Gerak Bojonegoro, Jabung Ring Dike, Bendung Gerak Sembayat, dll); b. terehabilitasinya prasarana pengendali banjir (pintu air Demangan, normalisasi Kali Lamong, Kali Mungkung, Kali Grompol dan Kali Sawur, perbaikan Bengawan Solo Hulu (Jurug-Sragen), dll);
7	Meningkatnya kinerja	a. tersusunnya pola dan rencana pengelolaan sumber daya

No	Sasaran	Indikator
	pengelolaan sumber daya air	air di 69 wilayah sungai; b. disahkannya 63 peraturan perundangan dan/atau NSPK; serta c. terfasilitasinya pembentukan 71 wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air di daerah dan meningkatnya kapasitas sumber daya manusia
8	Meningkatkan keandalan sistem data dan informasi sumber daya air	a. terbentuk dan berfungsinya jejaring sistem data dan informasi sumber daya air di tingkat Pusat, 33 provinsi dan 31 BB/BWS; b. meningkatnya kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia pengelola sistem data dan informasi sumber daya air di Pusat, 33 provinsi dan 31 BB/BWS; serta c. meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi sumber daya air di Pusat, 33 provinsi dan 31 BB/BWS

5.2.2 Transportasi

Pada saat ini masih banyak permasalahan dalam penyelenggaraan transportasi yang perlu dibenahi, di antaranya: penyebaran pembangunan dan pengembangan transportasi yang masih terpusat di beberapa daerah saja, keterbatasan pendanaan pembangunan di sektor transportasi, SDM dan kelembagaan yang masih rendah kualitasnya, kondisi fisik prasarana dan sarana transportasi yang masih banyak mengalami "*backlog*" pemeliharaan yang berlangsung secara terus menerus. Hal ini terjadi karena belum optimalnya sistem perencanaan dan pengoperasian, serta masih kurang jelasnya pemisahan fungsi regulator, *owner*, dan operator dalam pelaksanaan pelayanan transportasi.

Terbatasnya jumlah dan buruknya kondisi sarana dan prasarana transportasi mengakibatkan tingginya biaya transportasi barang dan penumpang serta menurunnya keselamatan transportasi. Kondisi tersebut diperparah dengan penyebaran pembangunan dan pengembangan transportasi yang masih terpusat di beberapa wilayah dan perkotaan sehingga terjadi ketimpangan pelayanan transportasi antarwilayah perkotaan dan perdesaan.

Kebijakan dan perencanaan transportasi masih bersifat parsial baik sektoral maupun kedaerahan, dan belum terintegrasi secara lintas sektor dan lintas wilayah. Kepentingan daerah dalam pembangunan sarana dan prasarana transportasi masih dominan. Hal ini menandakan bahwa pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah belum efektif. Sistem transportasi multimoda yang terintegrasi dengan memanfaatkan potensi dan keunggulan wilayah belum dilaksanakan sehingga pelayanan transportasi kurang efisien dan efektif.

Pendanaan untuk pemeliharaan prasarana terbatas. Prasarana yang telah dibangun memerlukan pendanaan untuk pemeliharaan agar dapat mempertahankan tingkat pelayanannya. Selama ini pendanaan pemerintah dalam investasi sarana dan prasarana transportasi masih sangat dominan, padahal kemampuan pemerintah sangat terbatas. Sementara itu, peran swasta dan masyarakat masih belum optimal. Peningkatan KPS masih terkendala kerangka hukum dan peraturan untuk meningkatkan investasi swasta masih belum memadai. Kebijakan tarif yang memperhatikan kelayakan investasi, serta sistem konsesi, pembagian risiko antara pemerintah dan investor serta pola kompetisi masih belum menarik investasi swasta.

Penyediaan sarana dan prasarana transportasi perkotaan belum memadai. Dampak urbanisasi dan penambahan jumlah penduduk yang demikian cepat serta diiringi dengan peningkatan pendapatan masyarakat memicu terjadinya motorisasi yang diperparah dengan tingkat pelayanan transportasi umum yang rendah sehingga tidak kompetitif terhadap moda transportasi pribadi. Akibatnya, banyak kota-kota yang semakin bergantung pada moda kendaraan pribadi (menjadi *auto-dependent city*). Penyebaran pusat kegiatan yang tidak seimbang dan cenderung monosentris juga memberi beban yang besar bagi sarana dan prasarana transportasi sehingga mengakibatkan tingginya lalu-lintas pada ruas-ruas transportasi yang menuju ke pusat kota. Sebaliknya, pengembangan sarana dan prasarana transportasi seringkali justru turut memicu terjadinya "*urban sprawl*", padahal keberlanjutan kota (*urban sustainability*) ditentukan oleh kondisi transportasi perkotaan.

Aksesibilitas pelayanan transportasi bagi masyarakat di perdesaan rendah. Salah satu sebab banyak terjadi kemiskinan di perdesaan adalah karena aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan angkutan di perdesaan sangat kurang sehingga sulit bagi mereka untuk memasarkan hasil produksinya dan memenuhi kebutuhan hidup mereka, khususnya untuk menjangkau pasar permanen yang ada. Menurut data Kodeks 2008, penduduk perdesaan yang tinggal di daerah aliran sungai/lembah memiliki tingkat kesulitan paling tinggi untuk mengakses pasar permanen dengan jarak lebih dari 5 km, yakni mencapai 60,87 persen. Sementara itu, penduduk perdesaan yang tinggal di dataran mencapai 27,09 persen; untuk daerah perdesaan di wilayah pesisir/kepulauan 46,61 persen serta penduduk perdesaan yang tinggal di perbukitan terdapat 55,22 persen.

Pada era dunia tanpa batas (*borderless world*), kompatibilitas sistem dan teknologi dalam sistem transportasi nasional belum sepenuhnya siap dalam menghadapi tuntutan kompetisi yang semakin tinggi. Tuntutan kompatibilitas global menempatkan jaringan transportasi nasional berperan sebagai subsistem dari jaringan global dan regional, sehingga standar sistem operasi, standar keselamatan, dan kualitas pelayanan dituntut memenuhi standar internasional. Di samping itu, terdapat tuntutan untuk mengembangkan transportasi yang berkelanjutan, yang mampu melakukan adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim dan pemanasan global (***global warming***), mengingat sektor transportasi merupakan sektor penyebab sekaligus

penerima dampak perubahan iklim. Tantangan ke depan untuk memenuhi kebutuhan tersebut adalah pengembangan industri transportasi yang modern, efisien dan ditangani dengan manajemen profesional, teknologi yang memadai, serta sumber daya manusia yang profesional.

Sasaran umum pembangunan transportasi dalam lima tahun ke depan antara lain:

TABEL 5.11
SASARAN UMUM PEMBANGUNAN TRANSPORTASI 2010-2014

No	Sasaran	Indikator
1	Meningkatnya kapasitas sarana dan prasarana transportasi untuk mengurangi <i>backlog</i> maupun <i>bottleneck</i> kapasitas prasarana transportasi dan sarana transportasi antarmoda dan antarpulau yang terintegrasi sesuai dengan sistem transportasi nasional dan cetak biru transportasi multimoda	<ul style="list-style-type: none"> a. kondisi mantap jalan nasional menjadi 90 persen; b. kecepatan rata-rata kendaraan menjadi 60 km/jam di jalan nasional; c. pangsa angkutan laut domestik menjadi 100 persen dan angkutan ekspor impor menjadi 15 persen; d. pangsa angkutan KA barang menjadi 7 persen dan angkutan penumpang 23 persen; e. pertumbuhan penumpang angkutan udara dalam negeri menjadi 9,78 persen/tahun dan angkutan udara luar negeri menjadi 12,3 persen/tahun; f. meningkatnya pangsa pengguna moda transportasi umum di perkotaan; g. meningkatnya keterpaduan transportasi dengan tata ruang.
2	Meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan sarana dan prasarana transportasi.	<ul style="list-style-type: none"> a. terbangunnya sistem jaringan transportasi perkotaan dan perdesaan di wilayah terpencil, pedalaman, perbatasan dan pulau terdepan yang dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat; b. meningkatnya pelayanan perintis untuk wilayah tertinggal, terpencil, perbatasan, dan terisolir; c. tersedianya pelayanan transportasi bagi masyarakat berpendapatan rendah melalui skema PSO; d. meningkatnya keterjangkauan terhadap jasa transportasi bagi golongan masyarakat yang memiliki keterbatasan fisik, berpendapatan rendah, dan lanjut usia.
3	meningkatnya keselamatan masyarakat terhadap pelayanan sarana dan prasarana transportasi.	menurunnya tingkat kecelakaan transportasi pada tahun 2014 menjadi lebih kecil 50 persen dari kondisi eksisting tahun 2009
4	Restrukturisasi kelembagaan	terwujudnya aturan pelaksanaan yang mengatur pemisahan secara jelas antara regulator, pemilik, dan operator dalam penyelenggaraan pelayanan transportasi
5	Adaptasi dan mitigasi perubahan iklim pada	<ul style="list-style-type: none"> a. berkurangnya emisi kendaraan bermotor; b. terbangunnya pelabuhan dan bandar udara yang ramah

No	Sasaran	Indikator
	transportasi	<ul style="list-style-type: none"> ligkungan (<i>eco port</i> dan <i>eco airport</i>) c. terbangunnya transportasi umum massal di perkotaan; d. penggunaan energi yang ramah lingkungan; e. berkurangnya penggunaan kendaraan pribadi di kota-kota besar.

Sasaran pembangunan transportasi berdasarkan jenis modanya adalah sebagai berikut:

Sasaran pembangunan transportasi jalan adalah: (a) terpelihara dan meningkatnya daya dukung, kapasitas, dan kualitas pelayanan prasarana jalan untuk daerah-daerah yang perekonomiannya berkembang pesat dengan target penyelesaian pembangunan jalan lintas strategis sepanjang 19.370 km, khususnya Lintas Sumatra, Jawa, Bali, Kalimantan, Sulawesi, NTB, NTT, dan Papua; (b) meningkatnya aksesibilitas wilayah yang sedang dan belum berkembang pada koridor-koridor utama di tiap-tiap pulau, perdesaan, wilayah perbatasan, terpencil, dan pulau-pulau kecil; (c) terwujudnya partisipasi aktif pemerintah, BUMN, dan swasta dalam penyelenggaraan pelayanan prasarana jalan; serta (d) tersedianya mekanisme pendanaan untuk preservasi jalan dan terbentuknya forum lalu lintas angkutan jalan sebagai amanat UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Sasaran pembangunan Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) adalah: (a) terpenuhinya fasilitas keselamatan LLAJ di daerah rawan kecelakaan dan padat lalu lintas; (b) meningkatnya kondisi prasarana dan kelaikan serta jumlah sarana LLAJ; (c) meningkatnya keterjangkauan pelayanan transportasi umum bagi masyarakat luas di perkotaan dan perdesaan serta dukungan pelayanan transportasi jalan perintis di wilayah terpencil untuk mendukung pengembangan wilayah; (d) meningkatnya efektivitas regulasi dan kelembagaan transportasi jalan termasuk pelanggaran muatan lebih (*overloading*); (e) terwujudnya teknologi sarana yang ramah lingkungan, terutama di wilayah perkotaan, dan penanganan dampak polusi udara; (f) meningkatnya efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan transportasi perkotaan yang terpadu dengan sistem jaringan transportasi lainnya dengan target empat kota besar (Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Medan) sesuai dengan Cetak Biru Transportasi Perkotaan; serta (g) meningkatnya SDM profesional dalam perencanaan, pembinaan, dan penyelenggaraan LLAJ.

Sasaran pembangunan Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (ASDP) adalah: (a) meningkatnya keselamatan ASDP dan kelaikan serta jumlah sarana ASDP; (b) meningkatnya jumlah prasarana dermaga untuk menambah jumlah lintas penyeberangan baru yang siap operasi maupun menambah kapasitas lintas penyeberangan yang padat; (c) meningkatnya pelayanan angkutan perintis; (d) meningkatnya kelancaran operasi angkutan penyeberangan; serta (e) meningkatnya



peran serta swasta dan pemerintah daerah dalam pembangunan dan pengelolaan ASDP.

Sasaran pembangunan perkeretaapian adalah: (a) menurunnya tingkat kecelakaan dan fatalitas akibat kecelakaan kereta api; (b) mencapai tingkat keandalan 60 persen dalam pengoperasian perkeretaapian; (c) meningkatnya jaringan perkeretaapian, jalur-jalur baru dan kapasitas lintas yang sudah jenuh serta reaktivasi pelayanan angkutan kereta api, termasuk melanjutkan pembangunan MRT Jabodetabek dan monorail Jakarta; (d) bertambahnya kapasitas armada kereta api baik gerbong, lokomotif, maupun kereta penumpang; (e) selesainya seluruh peraturan turunan dari UU No. 23 tahun 2007 tentang Perkeretaapian; (f) meningkatnya kualitas perencanaan dan pendanaan serta penyempurnaan skema pendanaan (PSO, IMO, TAC); (g) meningkatnya sumberdaya manusia dan penguasaan teknologi; (h) tercapainya standarisasi perkeretaapian nasional secara terpadu agar kesinambungan investasi, operasi, dan pemeliharaan prasarana dan sarana perkeretaapian nasional dapat tercapai secara efisien; serta (i) meningkatnya KPS dalam penyelenggaraan perkeretaapian.

Sasaran pembangunan transportasi laut adalah: (a) terpenuhinya standar keselamatan dan keamanan pelayaran sesuai standar pelayaran internasional; (b) meningkatnya pangsa pasar armada pelayaran nasional untuk angkutan laut dalam negeri menjadi 100 persen dan angkutan ekspor-impor menjadi 10 persen dengan kepemilikan kapal baru 30 persen; (c) meningkatnya kuantitas dan kualitas pelayanan serta kinerja dan efisiensi kepelabuhanan untuk meningkatkan kompatibilitas internasional dan mendukung distribusi logistik nasional; (d) meningkatnya aksesibilitas pelayanan transportasi laut di kawasan perbatasan, daerah terpencil dan pedalaman, serta pulau-pulau kecil dan pulau terdepan; (e) terwujudnya rencana induk pelabuhan nasional (RIPN) sebagai acuan penetapan pelabuhan Hub Internasional; (f) terselesaikannya turunan peraturan dari UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran untuk meningkatkan iklim yang lebih kondusif bagi investasi dan peran serta pemerintah daerah, BUMN, swasta dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan prasarana transportasi.

Sasaran pembangunan transportasi udara adalah: (a) terjaminnya keselamatan dan keamanan penerbangan sesuai dengan standar internasional; (b) meningkatnya pelayanan dan kapasitas bandar udara; (c) terwujudnya kelancaran dan kesinambungan pelayanan angkutan penerbangan domestik, internasional, maupun perintis; (d) terciptanya persaingan usaha yang sehat dalam industri penerbangan; (e) terselesaikannya secara tegas pembagian tugas dan fungsi antara regulator dan operator; (f) terjaminnya pengembangan industri penerbangan baik nasional yang berkelanjutan; (g) meningkatnya kualitas SDM penerbangan; (h) terlaksananya azas *cabotage*; serta (i) meningkatnya partisipasi swasta dalam penyelenggaraan bandara.

5.2.3 Perumahan dan Permukiman

5.2.3.1 Perumahan

Sampai akhir tahun 2009, pembangunan perumahan masih dihadapkan pada empat permasalahan pokok sebagai berikut.

Penyediaan rumah masih terbatas. Jumlah kekurangan rumah (*backlog*) meningkat dari 5,8 juta unit pada tahun 2004 menjadi 7,4 juta unit pada tahun 2009. Akumulasi *backlog* diperkirakan akan terus terjadi akibat pertumbuhan 710.000 rumah tangga baru per tahun.

Masih terdapat Rumah tangga yang menempati rumah tidak layak huni. Pada tahun 2007 masih terdapat 9,25 persen rumah tangga yang menempati rumah dengan kondisi rusak dan 0,87 persen dengan kondisi rusak berat.

Jaminan kepastian bermukim (*secure tenure*) masih lemah. Pada akhir tahun 2007 masih terdapat 22,06 persen rumah tangga yang menempati rumah milik sendiri tanpa bukti hukum berupa sertipikat BPN, girik, maupun akta jual beli.

Semakin meluas permukiman kumuh. Upaya peningkatkan kualitas permukiman belum dapat mengurangi laju pertumbuhan luas permukiman kumuh. Dengan peningkatan 1,37 persen per tahun, luas permukiman kumuh meningkat dari 54.000 ha pada tahun 2004 menjadi 57.800 ha pada tahun 2009.

Berbagai permasalahan pokok di atas disebabkan oleh berbagai faktor berikut:

Akses masyarakat berpenghasilan rendah terhadap penguasaan dan legalitas lahan terbatas. Tingginya laju pertumbuhan penduduk di perkotaan, keterbatasan lahan perumahan dan permukiman, serta peningkatan harga lahan semakin mempersulit akses masyarakat untuk menempati hunian yang layak dan terjangkau di perkotaan. Tingginya biaya pengurusan serta keterbatasan informasi terhadap prosedur sertifikasi dan rencana tata ruang mengakibatkan sebagian masyarakat menempati rumah tanpa memiliki bukti legalitas pemanfaatan lahan dan bangunan serta tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

Akses masyarakat terhadap pembiayaan perumahan terbatas. Upaya fasilitasi pembangunan perumahan oleh pemerintah masih menghadapi kendala keterbatasan anggaran pembangunan perumahan dan subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah belum termanfaatkannya alternatif sumber pembiayaan, masih minimnya kerjasama pemerintah-swasta, serta diperburuk lagi dengan masih rendahnya partisipasi serta kapasitas lembaga penyalur subsidi kredit mikro pembangunan perumahan.

Kelembagaan penyelenggaraan pembangunan perumahan dan permukiman belum mantap. Penyerahan kewenangan pembangunan perumahan yang menjadi urusan wajib pemerintah daerah belum disertai dengan peningkatan

kapasitas kelembagaan dan kualitas SDM serta perangkat organisasi penyelenggara dalam memenuhi standar pelayanan minimal di bidang pembangunan perumahan. Koordinasi antarlembaga juga belum berjalan baik, salah satunya ditunjukkan dengan belum efektifnya fungsi Badan Koordinasi Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman Nasional (BKP4N).

Belum mantap pasar primer dan pembiayaan sekunder perumahan. Kinerja pasar primer perumahan masih dihadapkan pada beberapa kendala, antara lain, belum adanya standardisasi KPR dan sumber pendanaan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) yg masih bertumpu pada dana pihak ketiga berjangka pendek sehingga terjadi ketidaksesuaian jangka waktu pengembalian antara sumber pendanaan dan investasi pembangunan perumahan. Ketidaksesuaian tersebut berimplikasi pada tingginya suku bunga KPR akibat tingginya risiko yang ditanggung oleh kreditur. Hal ini terjadi akibat belum berjalannya pembiayaan sekunder perumahan sesuai dengan yang diharapkan.

Masih rendah efisiensi dalam pembangunan perumahan. Biaya transaksi administrasi perijinan dalam pembangunan perumahan yang masih tinggi serta minimnya informasi dan transparansi mengenai proses perijinan sesuai dengan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik berimplikasi pada meningkatnya harga jual rumah sehingga mengurangi keterjangkauan (*affordability*) masyarakat, khususnya yang berpenghasilan rendah.

Pemanfaatan sumber daya perumahan dan permukiman belum optimal. Pembangunan dan perbaikan rumah yang dilakukan oleh masyarakat secara swadaya belum disertai dengan fasilitasi peningkatan kapasitas masyarakat, pemanfaatan sumber daya lokal, serta pengembangan dan pemanfaatan teknologi untuk mewujudkan penyediaan rumah yang terjangkau.

5.2.3.2 Permukiman

Untuk pembangunan prasarana dan sarana dasar permukiman, permasalahan utama yang dihadapi adalah rendahnya akses terhadap air minum dan sanitasi (air limbah, pengelolaan persampahan, dan drainase). Secara umum, faktor-faktor yang diidentifikasi menyebabkan terjadinya kondisi ini antara lain: (1) belum memadainya perangkat peraturan; (2) terbatasnya penyedia layanan yang kredibel dan profesional; (2) belum optimalnya sistem perencanaan serta (4) terbatasnya pendanaan.

A. Air Minum

Permasalahan utama pembangunan air minum adalah masih rendahnya akses terhadap penyediaan air minum. Beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya kondisi ini antara lain:

Belum lengkap dan terbaharukan perangkat peraturan yang mendukung

penyediaan air minum. Salah satu akibatnya adalah sulitnya PDAM menjalankan prinsip korporasi. UU Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah sampai saat ini belum direvisi. Maraknya penyediaan air minum berbasis masyarakat juga terkendala oleh tiadanya perundangan yang mengatur pola kerjasama pemerintah dan masyarakat.

Menurun kuantitas, kualitas, dan kontinuitas air baku air minum. Tidak terolahnya limbah domestik dan nondomestik menjadi penyebab utama menurunnya kualitas air baku air minum. Sementara itu, pemanfaatan air yang belum efisien dan masih minimnya pengelolaan air baku pada wilayah hulu dan/atau daerah resapan menyebabkan semakin berkurangnya air baku air minum. Penyusunan rencana tata ruang wilayah (RTRW) yang kurang bersinergi dengan konsep pengelolaan daerah aliran sungai (DAS) makin mengancam ketersediaan air baku bagi daerah hilir. Ekstraksi air tanah secara berlebihan oleh rumah tangga dan industri telah menurunkan kuantitas dan kualitas air baku. Penerapan teknologi pemanfaatan sumber air alternatif juga belum diprioritaskan.

Masih terbatas penyedia air minum baik oleh perusahaan daerah air minum (PDAM) dan non-PDAM yang sehat (kredibel dan profesional). Hasil audit kinerja PDAM pada tahun 2007 menunjukkan hanya 22,42 persen atau 61 dari 272 PDAM bahwa dalam kondisi sehat: Sementara itu, akumulasi bahwa kerugian seluruh PDAM yang merugi (68,02 persen) telah mencapai Rp. 4,83 triliun. Penyebab utamanya adalah 55,51 persen PDAM masih menerapkan tarif rata-rata di bawah biaya produksi air minum, disamping kapasitas sumber daya manusia dan pendanaan yang belum memadai, belum diterapkannya manajemen aset, serta belum disusunnya *bussiness plan* yang absah. Untuk penyediaan air minum yang berbasis masyarakat, kualitas sumber daya manusia pada lembaga pengelolanya juga masih menjadi kendala.

Belum optimal sistem perencanaan penyediaan air minum. Hampir seluruh kota/kabupaten belum memiliki rencana induk sistem penyediaan air minum yang absah. Belum terpetakannya wilayah yang akan dilayani sistem perpipaan maupun non-perpipaan menyebabkan banyak sistem penyediaan air minum, khususnya di perkotaan, menjadi saling tumpang tindih.

Terbatas pendanaan untuk mendukung keseluruhan aspek penyediaan air minum. Pendanaan air minum masih bertumpu pada anggaran pemerintah. Rendahnya kinerja keuangan PDAM juga menyebabkan PDAM sulit mendapatkan sumber pendanaan alternatif. Sementara itu, sumber pendanaan dari pihak swasta, baik dalam bentuk KPS ataupun *Corporate Social Responsibility* (CSR) masih belum dimanfaatkan secara signifikan.

B. Air Limbah

Permasalahan utama yang dihadapi mencakup masih rendahnya akses penduduk terhadap pelayanan air limbah. Beberapa faktor penyebab terjadinya kondisi ini yaitu:

Belum memadai perangkat peraturan yang mendukung pengelolaan air limbah. Saat ini payung kebijakan yang mendukung pengelolaan air limbah hanya berupa UU Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air pasal 21 ayat (2) bahwa perlindungan dan pelestarian sumber air -salah satunya- dilakukan melalui pengaturan sarana dan prasarana sanitasi.

Masih rendah kesadaran pelaku akan pengelolaan air limbah yang layak. Rendahnya kesadaran pelaku akan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) –yang salah satunya ditunjukkan dengan masih terdapatnya 28,9 persen penduduk yang melakukan praktik buang air besar sembarangan (BABS)- serta rendahnya pemanfaatan IPAL dan instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT) merupakan penyebab utama terjadinya pencemaran air permukaan.

Minim pengelola air limbah baik oleh perusahaan daerah dan nonperusahaan daerah (Perusda dan non-Perusda) yang kredibel dan profesional. Institusi pengelola air limbah masih belum menerapkan prinsip manajemen yang baik, yang ditunjukkan dengan belum adanya manajemen aset dan penyusunan *business plan* yang absah, serta kurangnya dukungan SDM yang berkualitas pada non-Perusda yang mengelola air limbah. Selain itu, masih rendahnya kesediaan membayar (*willingness to pay*) dari masyarakat untuk pelayanan air limbah domestik dan minimnya subsidi pemerintah menjadikan pengelola tidak dapat menutup biaya pelayanannya secara penuh (*full-cost recovery*).

Belum tersedia rencana induk pengelolaan air limbah. Hampir seluruh kota di Indonesia belum memetakan kebutuhan infrastruktur dan layanan air limbah serta tidak tersedianya rencana rinci terhadap pemenuhan kebutuhan tersebut. Akibatnya, prioritas serta pentahapan pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana air limbah tidak tergambar jelas.

Terbatas pendanaan untuk mendukung keseluruhan aspek pengelolaan air limbah. Kepedulian pemerintah pada pengelolaan air limbah sekarang berada pada titik tertinggi sejak beberapa tahun terakhir. Namun demikian, peningkatan alokasi pendanaan masih belum mampu untuk membiayai total kebutuhan yang ada. Di sisi lain, skema-skema pembiayaan yang bersumber dari nonpemerintah masih belum dikembangkan, termasuk KPS dan CSR.

C. Pengelolaan Persampahan

Permasalahan utama yang dihadapi dalam pembangunan persampahan adalah rendahnya akses terhadap layanan pengelolaan sampah. Terdapat 5 faktor yang diidentifikasi menjadi penyebab terjadinya kondisi ini, yaitu sebagai berikut.

Masih belum memadai perangkat peraturan yang mendukung pengelolaan sampah. Implementasi UU Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah masih terkendala oleh belum tersedianya peraturan-peraturan pendukungnya.

Penanganan sampah belum optimal. Hingga saat ini penanganan sampah masih terfokus pada penanganan timbulan sampah dan belum ada pengurangan volume sampah dari sumbernya. Penerapan konsep 3R yang belum terintegrasi dan belum diterapkannya pemanfaatan teknologi menyebabkan timbulan sampah belum berkurang secara signifikan. Dari sisi pengangkutan, masih sedikit sampah yang diangkut ke tempat pemrosesan akhir (TPA)/tempat pemrosesan sementara (TPS). Selain itu, sampah di TPS - yang merupakan titik pertemuan antara sistem pengangkutan yang dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah - masih belum ditangani dengan baik akibat kerancuan institusi pengelola. Mengenai TPA, banyak yang tidak didesain sebagai *sanitary landfill* atau mengalami perubahan sistem dari *sanitary landfill* dan/atau *controlled landfill* menjadi *open dumping*. Makin terbatasnya lahan untuk TPA dan makin tingginya timbulan sampah makin menyulitkan upaya penanganan persampahan.

Minim pengelola layanan persampahan yang kredibel dan profesional. Institusi pengelola sampah di daerah saat ini masih belum berfungsi secara profesional. Perusda belum memiliki manajemen aset dan menyusun *business plan* yang absah. Permasalahan yang muncul pada dinas pengelola sampah bahkan lebih menyeluruh baik berupa alokasi dana yang minim, manajemen yang kurang profesional dan minimnya kualitas SDM.

Belum optimal sistem perencanaan pengelolaan sampah. Belum adanya rencana induk pengelolaan sampah menjadikan belum tersedianya profil dan rencana penanganan sampah di tingkat kabupaten/kota. Ketiadaan rencana induk juga mengakibatkan tidak bersinerginya sistem pengelolaan sampah yang dilakukan oleh pemerintah dengan yang dilakukan oleh masyarakat sehingga integrasi penanganan sampah dari sumber hingga ke TPA belum tercapai.

Terbatas pendanaan untuk mendukung keseluruhan aspek pengelolaan sampah. Hingga saat ini, sumber pendanaan bagi pengelolaan sampah masih bertumpu pada anggaran pemerintah sebagai akibat belum dikembangkannya alternatif sumber pendanaan lainnya, seperti dana masyarakat, kerjasama swasta, investasi swasta dan dana CSR.

D. Drainase

Belum optimalnya fungsi drainase sebagai patus air hujan yang mengakibatkan timbulnya genangan merupakan permasalahan utama yang dihadapi dalam pembangunan drainase. Hal ini disebabkan oleh hal berikut.

Kapasitas sistem drainase sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini. Menurunnya fungsi saluran drainase yang berimplikasi pada peningkatan luasan dan durasi tergenang diakibatkan oleh kelangkaan lokasi pembuangan sampah, serta rendahnya kesadaran masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya. Pembuangan air limbah domestik dan air limbah industri rumah tangga ke saluran



drainase juga menyebabkan peningkatan debit air pada saluran drainase. Peningkatan debit limpasan hujan juga disebabkan oleh semakin berkurangnya bidang resapan dan adanya perubahan iklim akibat efek pemanasan global (*global warming*) yang menyebabkan peningkatan intensitas curah hujan dalam interval waktu yang semakin pendek.

Belum ada kejelasan pengelola sistem drainase. Ketidakjelasan pengelola menyebabkan tidak ada lembaga yang bertanggung jawab terhadap pemeliharaan saluran drainase. Hal itu mengakibatkan pengabaian atas kondisi saluran drainase sehingga berfungsi kurang optimal.

Belum optimal sistem perencanaan pengelolaan drainase. Perencanaan sistem pengelolaan drainase belum didasari dengan adanya suatu rencana induk pengelolaan sistem drainase yang absah. Selain itu, perencanaan sistem drainase saat ini juga belum mengintegrasikan antara sistem drainase primer, sekunder, dan tersier.

Terbatas pendanaan untuk mendukung keseluruhan aspek pengelolaan drainase. Terbatasnya anggaran pemerintah baik untuk investasi, operasi maupun pemeliharaan sistem drainase menjadikan pengelolaan drainase belum berjalan secara optimal. Ketidakjelasan pengelola sistem drainase, menyebabkan lemahnya operasi dan pemeliharaan sistem.

Berdasarkan beberapa permasalahan di atas sasaran umum yang akan dicapai dalam pembangunan perumahan dan permukiman adalah meningkatnya akses bagi rumah tangga terhadap rumah dan lingkungan permukiman yang layak, aman, terjangkau, dan didukung oleh prasarana dan sarana dasar serta utilitas yang memadai, serta memiliki jaminan kepastian hukum dalam bermukim (*secure tenure*) untuk mendukung pencapaian target *millenium development goals* (MDGs). Sasaran lain yang ingin dicapai adalah meningkatnya kualitas perencanaan dan penyelenggaraan pembangunan perumahan dan permukiman di tingkat pusat dan daerah.

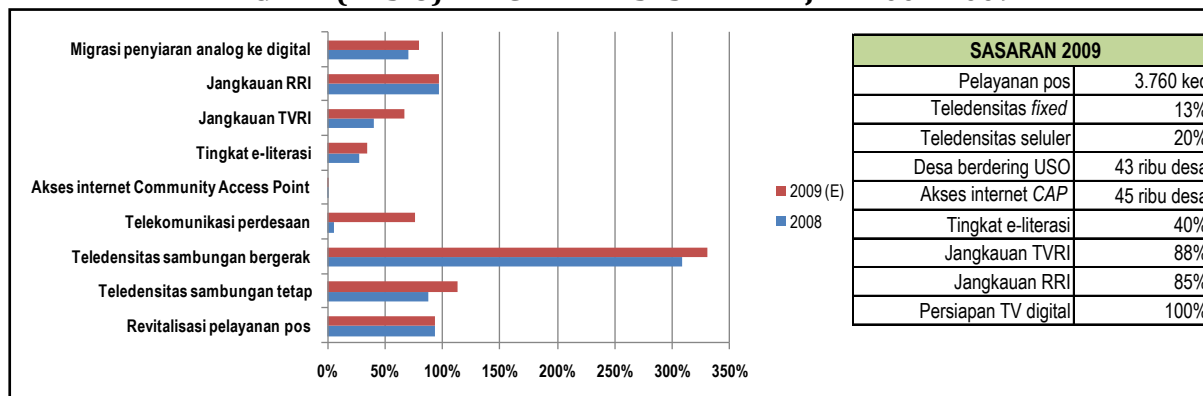
TABEL 5.12.
SASARAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN DAN
PERMUKIMAN 2010-2014

No	Sektor	Sasaran
1	Perumahan	Tersedianya akses bagi masyarakat terhadap perumahan baik perumahan baru maupun peningkatan kualitas perumahan dan lingkungan permukiman serta kepastian hukum bagi 5,6 juta rumah tangga
2	Air Minum	Tersedianya akses air minum bagi 70 persen penduduk pada akhir tahun 2014, dengan perincian akses air minum perpipaan 32 persen dan akses air minum non-perpipaan terlindungi 38 persen.
3	Air Limbah	Terwujudnya kondisi Stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS) hingga akhir tahun 2014, yang ditandai dengan tersedianya akses terhadap sistem pengelolaan air limbah terpusat (<i>off-site</i>) bagi 10 persen total penduduk, baik melalui sistem pengelolaan air limbah terpusat skala kota sebesar 5 persen maupun sistem pengelolaan air limbah terpusat skala komunal sebesar 5 persen serta penyediaan akses dan peningkatan kualitas terhadap sistem pengelolaan air limbah setempat (<i>on-site</i>) yang layak bagi 90 persen total penduduk.
4	Persampahan	Tersedianya akses terhadap pengelolaan sampah bagi 80 persen rumah tangga di daerah perkotaan.
5	Drainase	Menurunnya luas genangan sebesar 22.500 Ha di 100 kawasan strategis perkotaan

5.2.4 Komunikasi Dan Informatika

Hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan pos dan telematika periode 2004—2009 (Gambar 5.17) menunjukkan bahwa sebagian besar tingkat pencapaian sasaran RPJMN 2004-2009 masih rendah (di bawah 100 persen). Tingkat pencapaian terkait dengan penyediaan akses internet dan peningkatan e-literasi adalah yang paling rendah.

GAMBAR 5.17
TINGKAT (RASIO) PENCAPAIAN SASARAN RPJMN 2004-2009



Sumber: Direktorat Energi, Telekomunikasi dan Informatika, Bappenas, 2009

Permasalahan utama yang akan dihadapi dalam lima tahun mendatang adalah belum optimalnya penyediaan dan pemanfaatan sarana, prasarana dan layanan komunikasi dan informatika untuk kegiatan yang produktif sehingga mengakibatkan rendahnya tingkat daya saing. Indeks sarana dan prasarana TIK Indonesia mengalami penurunan tajam yaitu dari 3,50 di tahun 1995 menjadi 2,94 di tahun 2006, sedangkan indeks sarana dan prasarana TIK regional (Asia Timur dan Pasifik) di tahun 2006 sudah mencapai 7,04. Adapun tingkat daya saing sarana dan prasarana TIK Indonesia dibandingkan dengan negara lain masih rendah, terutama sarana dan prasarana internet dan *broadband* (Tabel 5.13).

TABEL 5.13
PERINGKAT KESIAPAN TEKNOLOGI 2008-2009

Negara	Peringkat									
	Daya Saing	Daya Saing Teknologi	Teknologi Maju	Daya Serap Teknologi	Regulasi TIK	FDI dan Transfer Teknologi	Jasa Seluler	Pengguna Internet	Jumlah Komputer	Broadband
Thailand	34	66	50	61	61	48	72	78	72	94
Indonesia	55	88	61	65	71	24	100	107	105	100
Vietnam	70	79	71	54	72	57	114	70	63	79
Philipina	71	70	52	49	60	50	84	101	70	96
Sri Lanka	77	82	54	45	59	47	102	117	94	98
Kamboja	109	123	109	106	122	94	120	130	128	108

Sumber: *Global Competitiveness Report 2008-2009*, World Economic Forum, 2008. Prasarana TIK merupakan bagian dari unsur kesiapan teknologi yang menjadi komponen dalam perhitungan tingkat daya saing bangsa.

TABEL 5.14
HASIL PEMERINGKATAN E-READINESS 2008

Negara	Peringkat	Nilai	Akses	Bisnis	Sosial	Hukum	Kebijakan	Adopsi
Thailand	47	5,22	3,80	6,99	5,07	5,90	5,25	5,10
Philipina	55	4,90	3,20	6,56	4,53	4,50	5,20	5,45
Sri Lanka	60	4,35	2,95	5,80	4,80	6,30	4,10	3,70
Vietnam	65	4,03	2,25	6,31	3,80	4,40	4,60	3,75
Indonesia	68	3,59	2,30	6,49	3,53	3,20	3,40	3,20

Sumber: *The Economist Intelligence Unit, 2008*. Keterangan: Akses adalah ketersediaan akses dan aplikasi; Bisnis adalah tingkat kemenarikan (*attractiveness*) negara sebagai target investasi; Sosial Budaya meliputi pendidikan dan e-literasi; Hukum meliputi kerangka regulasi dan peraturan TIK; Kebijakan adalah strategi pengembangan dan pembiayaan TIK; dan Adopsi Bisnis adalah potensi pemanfaatan TIK oleh dunia bisnis.

Permasalahan tersebut di atas disebabkan oleh faktor-faktor atau kondisi sebagai berikut.

Belum merata ketersediaan sarana, prasarana dan layanan komunikasi dan informatika, serta masih terbatas sarana dan prasarana *broadband*. Penyediaan sarana, prasarana dan layanan komunikasi dan informatika saat ini belum dapat memenuhi kebutuhan masyarakat secara optimal karena (a) penyediaannya masih cenderung pada wilayah komersial (perkotaan dan wilayah barat Indonesia); (b) masih tingginya biaya layanan TIK untuk sebagian besar masyarakat; (c) belum terintegrasinya pengembangan sarana dan prasarana komunikasi dan informatika dalam memasuki era konvergensi; serta (d) masih terbatasnya pengembangan sarana dan prasarana *broadband* nasional yang saat ini masih didominasi *wireless broadband* dan jangkauannya baru mencapai sekitar satu persen.

Belum optimalnya pemanfaatan spektrum frekuensi radio terlihat dari masih banyaknya penggunaan spektrum frekuensi radio secara ilegal. Hal ini menyebabkan ketidakefisienan pengalokasian dan pemanfaatan spektrum frekuensi radio. Rendahnya kualitas layanan akibat interferensi, membahayakan sistem komunikasi lainnya. Di sisi lain, sebagai sumber daya terbatas, penggunaan spektrum frekuensi radio terus meningkat seiring dengan berkembangnya aplikasi dan layanan berbasis nirkabel (*wireless*), baik untuk keperluan telekomunikasi, penyiaran, maupun komunikasi radio lainnya. Sementara itu, sebagai salah satu sumber Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP), Biaya Hak Penggunaan Frekuensi memberikan kontribusi signifikan, yaitu Rp 21,2 triliun (2004-November 2009).

Belum optimal penyelenggaraan komunikasi dan informatika. Hal ini disebabkan oleh dua faktor utama, yaitu: (a) belum optimalnya penerapan peraturan

otonomi daerah yang sering kali menimbulkan sengketa dan munculnya multi regulator (faktor eksternal); serta (b) belum selesainya proses penataan penyelenggaraan komunikasi dan informatika (faktor internal). Khusus mengenai LPP TVRI dan RRI, pembangunan sarana dan prasarana baru khususnya sarana dan prasarana TVRI sangat terbatas. Akibatnya, jangkauan siaran *terrestrial* TVRI turun drastis dari 81 persen menjadi 36 persen.

Penyelenggaraan telekomunikasi saat ini, khususnya pada segmen sambungan bergerak, sangat kompetitif dengan kehadiran 12 penyelenggara. Di satu sisi, penyelenggaraan yang kompetitif mempercepat penyediaan sarana dan prasarana, menyediakan pilihan bagi pengguna, dan mendorong terjadinya penurunan tarif. Di sisi lain, pasar yang sangat kompetitif⁴ menghasilkan nilai pasar (*market value*) yang kecil sehingga menyulitkan penyelenggara untuk berkembang dan mempertahankan kualitas pelayanan.

Masih terbatas kemampuan adopsi dan adaptasi teknologi. Kondisi ini mengakibatkan tingginya ketergantungan terhadap industri luar negeri dan teknologi/aplikasi *proprietary*. Belum diimplementasikannya konsep teknologi netral⁵ dalam rezim perizinan seringkali mengakibatkan kurang optimalnya pemanfaatan teknologi itu sendiri. Di sisi lain, lambatnya kecepatan pemerintah dan penyelenggara terutama BUMN pos dan LPP dalam mengadopsi teknologi terbaru menurunkan efektivitas penyediaan layanan, kualitas layanan, dan daya saing perusahaan.

Rendahnya tingkat e-literasi aparatur pemerintah dan masyarakat memperlambat pemahaman dan pemanfaatan TIK dalam kegiatan pemerintahan, perekonomian, dan kehidupan masyarakat sehari-hari. Permasalahan ini terkait erat dengan masih tingginya biaya layanan internet, terbatasnya fasilitas TIK seperti komputer dan jaringan internet, daya beli dan tingkat pendidikan masyarakat.

Terbatas pengembangan industri manufaktur dalam negeri, aplikasi, dan konten lokal sebagai pembangkit *demand*. Masih tingginya ketergantungan kepada industri manufaktur luar negeri terlihat dari rendahnya kontribusi/porsi industri dalam negeri dalam belanja modal sarana dan prasarana TIK nasional khususnya telekomunikasi. Keberpihakan pemerintah terhadap industri TIK dalam negeri, antara lain, terlihat dari ketentuan⁶ penggunaan industri dalam negeri oleh penyelenggara telekomunikasi senilai 30 persen dari total belanja modal dan 50 persen dari belanja operasional, serta proteksi industri dalam negeri pada implementasi *broadband wireless access*. Perhatian perlu diberikan kepada upaya peningkatan kemampuan dan kapasitas

⁴ Perlu diantisipasi perilaku kompetisi antarpenyelenggara yang kontraproduktif. Hal ini terlihat dari strategi perang tarif dan promosi iklan yang berlebihan untuk merebut dan mempertahankan pasar dengan mengorbankan kualitas layanan

⁵ Perizinan saat ini masih berbasis teknologi

⁶ Termasuk pinaltinya sebagaimana diatur dalam PP No. 7 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Komunikasi dan Informatika

industri dalam negeri dalam memenuhi kebutuhan tersebut. Disamping itu, industri kreatif berpotensi dalam mendorong penciptaan *demand*, tetapi hal tersebut belum didukung oleh penegakan dan perlindungan hukum atas hak kekayaan intelektual, inkubasi inovasi, dan pengembangan konten lokal.

Belum optimal pemanfaatan sumber pembiayaan dalam penyediaan sarana, prasarana, dan layanan komunikasi dan informatika. Perkembangan TIK yang sangat cepat membawa dampak kepada meningkatnya kebutuhan akan investasi baru dalam waktu yang lebih singkat sehingga investasi jangka panjang menjadi tidak menarik lagi. Selain itu, kemampuan pembiayaan swasta juga diperkirakan cenderung menurun yang dipicu oleh krisis keuangan global. Upaya efisiensi investasi melalui implementasi konsep pergeseran belanja modal menjadi belanja operasi yang, antara lain, dapat ditempuh melalui pemanfaatan sarana dan prasarana secara bersama (*infrastructure sharing*) belum optimal dilaksanakan. Disamping itu, masih terbatasnya mekanisme pembiayaan bersama (*co-sharing*) antarinstansi yang terlibat menyebabkan terjadinya duplikasi investasi. Tingkat utilisasi PNBPN juga belum optimal, yaitu kurang dari sepuluh persen pada tahun 2008.

Selain berbagai permasalahan tersebut di atas, subbidang ini dalam lima tahun ke depan juga menghadapi tantangan utama sebagai berikut.

Konvergensi antara telekomunikasi, informatika dan penyiaran menuntut perubahan struktur industri dari terintegrasi secara vertikal menjadi horizontal. Di satu sisi, konvergensi mendorong terjadinya efisiensi dan optimalisasi sumber daya baik pembiayaan, sarana dan prasarana, maupun sumber daya terbatas (spektrum frekuensi radio, orbit satelit, penomoran, dan alamat IP). Di sisi lain, kondisi regulasi saat ini belum sesuai dengan arah konvergensi sehingga menimbulkan tumpang tindih dan ketidakpastian regulasi bagi industri/sector yang pada akhirnya berdampak kepada pembebanan biaya tinggi pada penyelenggara dan masyarakat.

Untuk mengantisipasi permasalahan tersebut di atas, pemerintah perlu segera melakukan restrukturisasi industri/penyelenggaraan dan reorganisasi kementerian yang menangani isu pembangunan komunikasi dan informatika (Dep. Komunikasi dan Informatika) untuk menata kembali bentuk/struktur organisasi beserta tugas pokok dan fungsi unit kerja di bawahnya dari pendekatan sektor (vertikal) menjadi pendekatan isu (horizontal).

Meningkat *cyber crime* (*misuse* dan *abuse* pemanfaatan TIK). Sejalan dengan semakin meningkatnya kegiatan berbasis TIK dalam kehidupan sehari-hari, tingkat kejahatan berbasis TIK (*cyber crime*) juga meningkat. Kejahatan ini tidak saja dapat menimbulkan kerugian finansial dan keresahan masyarakat, tetapi juga mengancam keamanan dan persatuan nasional. Walaupun saat ini sudah terdapat UU Informasi dan Transaksi Elektronik dan sedang disusunnya RUU *Cyber Crime* sebagai salah satu sarana pencegah penyalahgunaan pemanfaatan TIK, pendidikan kepada masyarakat untuk memanfaatkan TIK dengan memperhatikan nilai-nilai agama dan sosial budaya

masyarakat Indonesia dan etika umum yang berlaku (*cyber ethics*) merupakan isu pokok dalam lima tahun mendatang.

Untuk mendukung pelaksanaan arah RPJMN 2010-2014 serta dalam rangka mewujudkan masyarakat informasi Indonesia tahun 2015, pembangunan sarana dan prasarana komunikasi dan informatika tahun 2010-2014 diarahkan untuk memperkuat *virtual domestic interconnectivity* (*Indonesia connected*), melalui: (a) pengurangan kesenjangan digital dan wilayah *blank spot*; (b) peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana dan layanan komunikasi dan informatika yang aman dan modern dengan kualitas baik dan harga terjangkau; serta (c) peningkatan kualitas penyediaan dan pemanfaatan informasi, serta penggunaan TIK secara efektif dan bijak dalam seluruh aspek kehidupan.

Sasaran pembangunan sarana dan prasarana komunikasi dan informatika tahun 2010-2014 yang hendak dicapai adalah sebagai berikut.

TABEL 5.15
SASARAN PEMBANGUNAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NO	SASARAN	INDIKATOR DAN TARGET PENCAPAIAN TAHUN 2014
1.	Tersedianya akses komunikasi dan informatika yang merata di seluruh Indonesia (mengecilnya kesenjangan digital)	Jumlah provinsi yang memiliki indeks kesiapan kompetisi (<i>competition readiness index</i>) baik ⁷ : sekurang-kurangnya 49 persen dari total jumlah provinsi di seluruh Indonesia mempunyai indeks tinggi dan 51 persen dengan indeks menengah.
2.	Tersedianya sarana, prasarana, dan layanan komunikasi dan informatika di seluruh desa, daerah perbatasan negara, pulau terluar, daerah terpencil, dan wilayah non komersial lain untuk mengurangi daerah <i>blank spot</i>	<ul style="list-style-type: none"> a. Jangkauan layanan pos universal mencapai 100 persen di wilayah PSO; b. Jangkauan layanan akses telekomunikasi universal dan internet mencapai 100 persen di Wilayah USO; serta c. Jangkauan siaran TVRI dan RRI terhadap populasi masing-masing mencapai 88 persen.
3.	Tersedianya akses dan layanan komunikasi dan informatika yang modern	<ul style="list-style-type: none"> a. Tingkat penetrasi pengguna internet sekurang-kurangnya 50 persen; b. Tingkat penetrasi pengguna layanan <i>broadband</i> sekurang-kurangnya 30 persen; c. Tingkat penetrasi siaran TV digital terhadap populasi sekurang-kurangnya 35 persen;

⁷ Meliputi daerah dengan indeks kompetisi tinggi (*intensive competition*) dan menengah (*workable competition*).

NO	SASARAN	INDIKATOR DAN TARGET PENCAPAIAN TAHUN 2014
		<ul style="list-style-type: none"> d. Jaringan <i>backbone</i> serat optik telekomunikasi yang menghubungkan antarpulau besar mencapai 100 persen; e. Jumlah ibukota kabupaten/kota yang dilayani jaringan <i>broadband</i> mencapai 75 persen dari total ibukota kabupaten/kota.⁸
4.	Tercapainya tingkat e-literasi masyarakat Indonesia	Tingkat e-literasi 50%
5.	Tersedianya informasi dan layanan publik yang dapat diakses secara <i>online</i>	<ul style="list-style-type: none"> a. Nilai rata-rata <i>e-government</i> instansi pemerintah sekurang-kurangnya menjadi baik⁹; b. Jumlah aparatur pemerintah yang paham TIK menjadi 80 persen; c. Prosentase jumlah e-provinsi yang merupakan muara sistem elektronik kabupaten/kota di masing-masing provinsi mencapai 100 persen; d. Tersedianya layanan publik yang dapat diakses secara <i>online</i> sekurang-kurangnya untuk layanan kependudukan (<i>e-citizen</i>), perizinan (<i>e-licensing</i>), dan pengadaan (<i>e-procurement</i>).
6.	Berkembangnya industri (manufaktur) penunjang TIK	<ul style="list-style-type: none"> a. Penggunaan alat dan perangkat telekomunikasi dalam negeri mencapai 30 persen; dan b. Prosentase TKDN <i>set top box</i> TV digital sekurang-kurangnya mencapai 50 persen.

Peran pemerintah dalam bentuk kerangka investasi difokuskan untuk pencapaian sasaran kedua dan kelima, sedangkan pencapaian sasaran lainnya ditempuh melalui kerangka regulasi dan skema KPS.

5.2.5 Energi Dan Ketenagalistrikan

Untuk periode RPJMN 2010-2014 pembangunan energi dan ketenagalistrikan diperkirakan masih menghadapi beberapa permasalahan, di antaranya adalah sebagai berikut :

Bauran energi (*energy mix*) belum optimal. Ketergantungan akan energi fosil/konvensional berdasarkan kondisi bauran energi tahun 2008 masih tinggi. Selain itu komposisi energi final di Indonesia pada tahun 2008 ditandai dengan

⁸ Termasuk ibukota kab/kota di wilayah timur Indonesia yang harus selesai sebelum tahun 2013

⁹ Yang dimaksud dengan baik adalah mempunyai nilai rata-rata total sebesar 3,4 dari keseluruhan dimensi yang dinilai, yaitu kebijakan, kelembagaan, sarana dan prasarana, aplikasi dan perencanaan berdasarkan penilaian yang dilakukan secara berkala oleh Dep. Komunikasi dan Informatika melalui kegiatan Peningkatan *e-Government* Indonesia (PeGI)

ketergantungan yang masih besar terhadap bahan bakar fosil (terutama minyak bumi) sebesar 47,1 persen dari total bauran energi. Hal ini selain mengakibatkan dampak buruk terhadap lingkungan juga biaya penyediaan energy sangat menjadi mahal karena penyediaan energi (terutama minyak bumi) saat ini tidak hanya terkait pasokan dan permintaan namun telah menjadi komoditas untuk motif transaksi dan berspekulasi.

Presentase pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT) untuk pembangkit listrik baik skala besar maupun skala kecil dan menengah juga masih rendah. Pemanfaatan panas bumi baru sebesar 1.052 MW dari total potensi sebesar 27 GW atau baru sebesar 3,9 persen. Untuk mikrohidro, pemanfaatannya baru sebesar 17,2 persen dari total potensi sebesar 500 MW, dan biomassa hanya sebesar 0,8 persen dari total potensi yang ada sebesar 49,81 GW.

Proporsi bauran energi primer untuk pembangkit listrik juga masih belum sehat. Penggunaan BBM untuk pembangkit listrik sampai saat ini masih cukup besar (34 persen). Namun, biaya operasi pembangkit BBM tersebut mencapai 79 persen dari total biaya operasi total pembangkit. Di sisi lain, pangsa energi baru terbarukan untuk pembangkit listrik masih sangat terbatas, sedangkan pemanfaatan batubara dan gas bumi sebagai sumber energi pembangkit listrik masih terkendala oleh terbatasnya pasokan akibat struktur pasarnya yang liberal dan oleh adanya kontrak-kontrak jangka panjang.

Pasokan energi masih terbatas (jumlah, kualitas, dan keandalan). Kapasitas sarana dan prasarana minyak dan gas bumi perkembangannya sangat terbatas. Kapasitas kilang minyak bumi pada periode 2004-2009 tidak mengalami penambahan. Akibatnya, Indonesia selain mengimpor minyak mentah juga harus mengimpor BBM untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Permasalahan yang dihadapi untuk sarana dan prasarana gas bumi di antaranya pilihan melakukan ekspor atau memenuhi kebutuhan domestik serta pilihan cara distribusi antara pembangunan pipa transmisi atau terminal. Selain itu, kapasitas sarana prasarana gas bumi berupa fasilitas *LNG Receiving Terminal* masih belum memadai, sehingga pemanfaatan LNG untuk konsumsi dalam negeri masih terbatas, sedangkan kapasitas jaringan pipa distribusi gas bumi untuk rumah tangga (gas kota) masih terbatas.

Pada sisi penyediaan tenaga listrik tampak bahwa kapasitas pembangkit tenaga listrik sampai saat ini masih belum mampu mencukupi kebutuhan. Pertumbuhan kapasitas pembangkit tidak seimbang dengan pertumbuhan beban, yang sampai dengan tahun 2008 hanya bertambah sebesar 4.838 MW sejak 2004. Hal ini terlihat dari rasio elektrifikasi yang diperkirakan baru mencapai 65,1 persen, atau dengan kata lain, terdapat sekitar 36 juta¹⁰ rumah tangga Indonesia masih membutuhkan tenaga listrik.

¹⁰ Berdasarkan Survei Penduduk Antar Sensus tahun 2005 (SUPAS 2005) jumlah penduduk Indonesia adalah sebesar 218.868.791 orang, sedangkan jumlah rumah tangga adalah sebesar 55.127.716 KK.

Selain itu, tingkat keandalan pembangkit masih rendah dengan cadangan daya (*reserve margin*) berkisar 25 persen sedangkan minimum yang diharapkan adalah sebesar 35-40 persen.

Kondisi sistem transmisi interkoneksi masih belum andal. Sampai saat ini, keandalan sistem transmisi dan distribusi masih rendah dengan tingkat susut (*losses*) masih di atas 10 persen. Perkembangan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, di luar sistem Jawa-Madura-Bali, sistem transmisi interkoneksi baru mencakup sebagian dari sistem Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Sementara itu, untuk sistem Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua belum dimiliki sistem transmisi interkoneksi.

Teknologi dan pendanaan didominasi asing. Pendanaan untuk prasarana energi merupakan permasalahan tersendiri yang perlu dicermati mengingat padat modal sehingga memerlukan dukungan pendanaan yang besar, tetapi, di sisi lain kemampuan pendanaan pemerintah terbatas. Sebagai contoh, negara (pemerintah) mempunyai tanggung jawab dalam penyediaan energi listrik terutama di daerah terpencil dan perdesaan, namun dalam kenyataannya negara tidak memiliki dana yang cukup untuk membangun sarana penyediaan tenaga listrik yang berupa pembangkit, jaringan transmisi, dan jaringan distribusi. Dana pemerintah baik APBN maupun APBD serta dana BUMN yang disalurkan ke PT. PLN (Persero), tidak mencukupi untuk membangun seluruh sarana penyediaan tenaga listrik yang dibutuhkan. Oleh karena itu, perlu diupayakan sumber pendanaan lain baik pinjaman maupun hibah dari luar negeri serta partisipasi swasta, baik swasta dalam negeri maupun swasta asing. Keadaan ini menyebabkan pembangunan sarana dan prasarana yang ada sangat tergantung pada ketersediaan dana pinjaman ataupun investasi dari luar/dalam negeri. Akibatnya rencana pembangunan sarana dan prasarana tidak mendapatkan kepastian investasi jangka panjang atau menjadi tidak efisien karena menggunakan dana yang lebih mahal.

Pada sisi teknologi, sampai saat ini masih Indonesia tergantung dengan teknologi asing mengingat prasarana energi merupakan padat teknologi. Hal ini mengakibatkan ketergantungan pada investasi dan teknologi luar negeri (*asing*) yang akhirnya menurunkan penggunaan komponen lokal baik sumber daya manusia (*jasa*) maupun barang. Selain itu, pada sisi pasokan peran BUMN masih mendominasi pasar energi nasional. Kondisi tersebut diperkirakan masih akan terjadi pada masa yang akan datang sehingga akan berpengaruh terhadap pengembangan prasarana energi termasuk di perdesaan untuk meningkatkan aksesibilitas masyarakat perdesaan terhadap energi listrik terutama di daerah terpencil, perbatasan dan pulau-pulau. Rendahnya pemanfaatan EBT juga diakibatkan oleh belum berjalannya kebijakan *energy pricing* dan adanya subsidi yang tidak tepat sasaran, sehingga harga EBT belum dapat bersaing sepenuhnya dengan harga energi konvensional.

Regulasi masih perlu disempurnakan diikuti dengan konsistensi kebijakan. Permasalahan penting lainnya yaitu belum adanya penyempurnaan regulasi yang disesuaikan dengan dinamika sektor sekaligus sebagai upaya penciptaan iklim

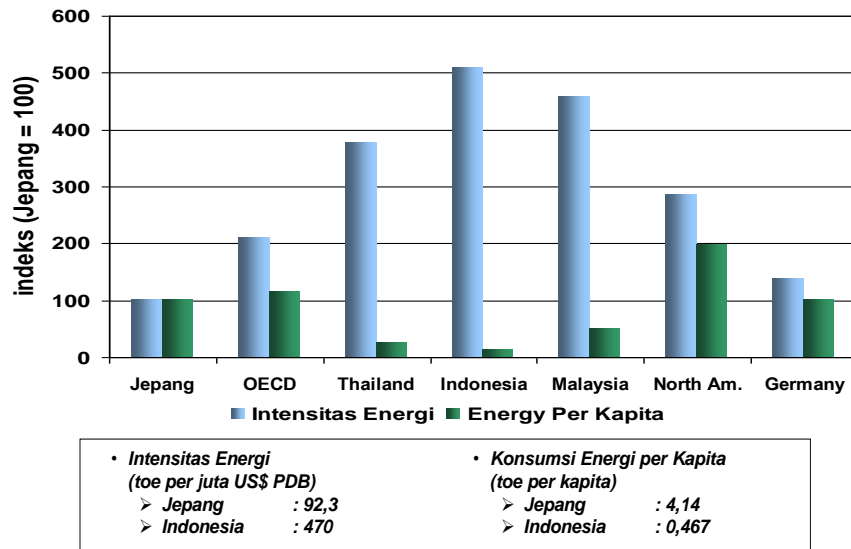


investasi yang kondusif. Selain itu, terdapat permasalahan yang berkaitan dengan penggunaan lahan untuk pembebasan tanah (*land acquisition*), pemukiman kembali (*resettlement*), serta permasalahan kehutanan yang terkait dengan klasifikasi hutan dan pemanfaatan lahannya, yang pada umumnya memerlukan waktu yang sangat lama dan penuh ketidakpastian.

Kebijakan harga (*pricing policy*) masih belum tepat. Harga energi saat ini belum sesuai dengan keekonomiannya. Kebijakan harga energi yang masih membutuhkan subsidi mengakibatkan harga energi menjadi murah sehingga menimbulkan penyalahgunaan dan pemborosan dalam pemanfaatan energi. Mengingat masih sangat tergantungnya energi terhadap sumber energi fosil, kondisi penyediaan energi nasional menjadi sangat rentan terhadap kondisi harga energi global dan membebani anggaran belanja negara. Selain itu, kondisi harga energi global saat ini sudah tidak sepenuhnya mencerminkan aspek pasokan permintaan namun terkait pula dengan aspek spekulasi.

Efisiensi dan konservasi energi masih belum berjalan dengan baik. Berdasarkan data mengenai konsumsi energi di Indonesia, intensitas dan elastisitas energi saat ini masih tinggi tapi di sisi lain konsumsi energi per kapita yang rendah menunjukkan pemakaian energi tidak produktif dan boros. Namun, hal ini harus dicermati lebih jauh mengingat tingkat produktivitas juga terkait dengan penciptaan nilai tambah yang berdimensi multisektor. Perbandingan dengan negara lain terlihat pada Gambar 5.18 berikut ini.

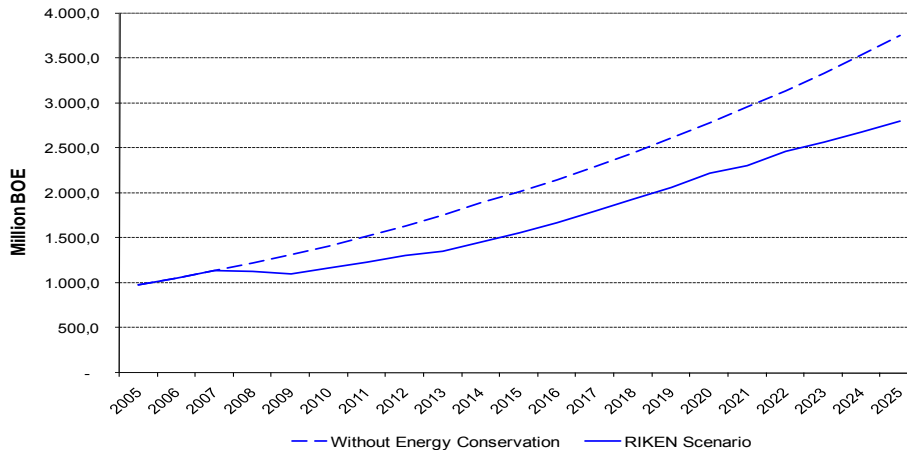
GAMBAR 5.18
KONSUMSI DAN ELASTISITAS ENERGI BEBERAPA NEGARA



Sumber : Rancangan *Blueprint* Pengelolaan Energi Nasional 2010-2025, Tahun 2009

Konservasi energi yang belum berkembang di tanah air dipengaruhi oleh pandangan bahwa Indonesia dikaruniai sumberdaya energi berlimpah sehingga menggunakan energi secara hemat bukanlah sebuah keharusan, dan pemahaman mengenai konservasi energi sebagai tindakan praktis juga belum berkembang di masyarakat karena masih langkanya penyebaran informasi atau kampanye mengenai teknik-teknik konservasi energi. Berikut ini grafik yang memperlihatkan perkiraan kebutuhan energi Indonesia 2005—2025 tanpa kebijakan konservasi dibandingkan jika dilakukan kebijakan konservasi energi.

GAMBAR 5.19
KEBUTUHAN ENERGI INDONESIA



Rata-rata pertumbuhan 2002-2025:

- Tanpa konservasi = 8,4 persen
- RIKEN = 5,6 persen

Sumber : Rancangan Blueprint Pengelolaan Energi Nasional 2010-2025, Tahun 2009

Pelaksanaan konservasi energi sesungguhnya memberikan keuntungan. Sebagai contoh, industri-industri dapat menurunkan biaya produksi bila penggunaan energi secara hemat terus dipraktekkan. Selain menekan biaya, konservasi energi berarti meningkatkan kapasitas pelayanan dan akses terhadap energi, yang didalamnya energi yang dihemat (BBM, listrik, dstnya) dapat diperluas pemanfaatannya untuk masyarakat lain, termasuk kaum *dhuafa*. Melalui konservasi, dampak negatif terhadap lingkungan diturunkan, bahkan kini melalui skema Mekanisme Pembangunan Bersih (*Clean Development Mechanism/CDM*), pengurangan polusi dapat dijual ke pasar emisi dunia, dan dengan lingkungan yang bersih maka kualitas kehidupan akan meningkat.

Parsitipasi pemerintah daerah dalam pemenuhan kebutuhan energi kurang. Sejauh ini hampir sebagian besar kebijakan pemenuhan kebutuhan energi nasional masih dilakukan sepenuhnya oleh pemerintah pusat. Sejalan dengan prinsip otonomi daerah, sudah selayaknya pemerintah daerah ikut berperan aktif dalam parsitipasi pemenuhan kebutuhan energi nasional. Namun, terlihat bahwa pemerintah daerah belum siap secara penuh untuk berperan optimal. Hal ini terlihat dari masih banyaknya kebijakan termasuk peraturan daerah yang menghambat, serta masih rendahnya alokasi APBD untuk pembangunan sarana dan prasarana energi.

Pada tahun 2014 diperkirakan kebutuhan/konsumsi energi final adalah sebesar 980 juta SBM, dengan konsumsi terbesar adalah sektor industri. Pada tahun yang sama kebutuhan energi final terbesar masih didominasi BBM dan LPG, yaitu sebesar 443.50 SBM.

TABEL 5.16
PERKIRAAN KEBUTUHAN/KONSUMSI ENERGI FINAL

Per Sektor	2010	2011	2012	2013	2014
Pertanian, Kons, & Pertambangan	46,7	49,02	51,34	53,66	55,98
Komersial	31,6	33,48	35,36	37,24	39,12
Industri	325,4	347,78	370,16	392,54	414,92
Rumah Tangga	131,7	149,3	166,9	184,5	202,1
Transportasi	239,8	246,82	253,84	260,86	267,88
TOTAL	775,2	826,4	877,6	928,8	980
Jenis Energi	2010	2011	2012	2013	2014
BBM dan LPG	392,3	405,1	417,9	430,7	443,5
Gas	134,9	139,2	143,5	147,8	152,1
Batubara & Briket	103,6	116,48	129,36	142,24	155,12
Biofuel	33,2	43,64	54,08	64,52	74,96
Listrik	111,2	121,86	132,52	143,18	153,84
TOTAL	775,2	826,28	877,36	928,44	979,52

Sumber : KESDM, 2009

Selanjutnya, dengan mempertimbangkan kebutuhan/konsumsi energi final tersebut di atas, sasaran pembangunan energi, terutama di sisi hilir, pada periode RPJMN 2010—2014 dalam rangka memenuhi kebutuhan/konsumsi energi final, antara lain, adalah sebagai berikut:

TABEL 5.17
SASARAN PEMBANGUNAN ENERGI DAN KETENAGALISTRIKAN

No.	Sasaran	Indikator dan Target Pencapaian Tahun 2014
1.	Tercapainya komposisi bauran energi yang sehat dengan menurunnya persentase pemanfaatan energi fosil dan meningkatnya persentase energi baru terbarukan (EBT)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Persentase pemanfaatan minyak bumi dalam bauran energi nasional sebesar 38,33 persen ▪ Persentase pemanfaatan energi baru terbarukan dalam bauran energi nasional sebesar 16,1 persen ▪ Pengembangan produksi dan pemanfaatan bahan bakar alternatif seperti bahan bakar nabati, batubara dicairkan, GTL (Gas To Liquid), DME (dimethyl eter) dan lain-lain ▪ Peningkatan pemanfaatan EBT untuk pembangkit tenaga listrik (PLTMH, PLTS, PLT Bayu, PLT Biomassa)
2.	Penurunan elastisitas	Elastisitas energi menjadi sebesar 1,48



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

No.	Sasaran	Indikator dan Target Pencapaian Tahun 2014
	energi	
3.	Pemanfaatan potensi pendanaan domestik dan skema pendanaannya	Termanfaatkannya potensi pendanaan dalam negeri baik dari lembaga keuangan perbankan maupun dari non perbankan nasional guna mendukung pengembangan energi batu terbarukan serta konservasi dan efisiensi energi
4.	Penyusunan dan penyempurnaan regulasi dan kebijakan guna meningkatkan jaminan dan kepastian hukum pemanfaatan energi baru terbarukan serta pengembangan konservasi dan efisiensi energi	Tersusunnya regulasi dan kebijakan pemanfaatan energi baru terbarukan serta pengembangan konservasi dan efisiensi energi
5.	Peningkatan kapasitas dan kualitas sarana dan prasarana energi nasional untuk memenuhi kebutuhan domestik dan komitmen ekspor	<ul style="list-style-type: none">▪ Tercapainya pembangunan jaringan gas kota untuk 80.000 sambungan rumah di 20 kota▪ Tercapainya pembangunan 21 buah SPBG di 3 kota▪ Tercapainya pemenuhan kebutuhan kapasitas dengan penambahan 30.500 MW▪ Terintegrasinya sistem di Sulawesi dan sistem di Kalimantan▪ Berkurangnya susut jaringan menjadi di bawah 10,0 persen▪ Meningkatnya pelayanan Izin Usaha Ketenagalistrikan▪ Meningkatnya penerapan standarisasi teknis bidang ketenaga listrikan yang disertifikasi SNI dan/atau diperlakukan wajib
6.	Peningkatan jangkauan pelayanan ketenagalistrikan	<ul style="list-style-type: none">▪ Rasio elektrifikasi meningkat dari 67,2 persen di tahun 2010 menjadi 80,0 persen di tahun 2014▪ Meningkatnya rasio desa berlistrik 94,5 persen di tahun 2010 menjadi 98,9 persen di tahun 2014
7.	Tercapainya bauran energi (<i>energy mix</i>) primer untuk penyediaan tenaga listrik	Pangsa energi primer untuk pembangkit tenaga listrik pada tahun 2014 menjadi : <ul style="list-style-type: none">▪ Batubara sebesar 64 persen▪ BBM sebesar 2 persen▪ Panas bumi sebesar 10 persen▪ Gas bumi sebesar 18 persen,▪ Hidro sebesar 6 persen
8.	Peningkatan efektifitas subsidi pemerintah	Terlaksananya subsidi yang tepat sasaran pada yang berhak menerima (<i>beneficiaries</i>)
9.	Berkembangnya ilmu pengetahuan, teknologi	<ul style="list-style-type: none">▪ Meningkatnya sertifikasi kompetensi bidang energi dan ketenagalistrikan

No.	Sasaran	Indikator dan Target Pencapaian Tahun 2014
	dan sumberdaya manusia nasional yang mendukung industri energi dan ketenagalistrikan nasional	▪ Meningkatnya Tingkat Komponen Dalam Negeri sesuai peraturan yang ada

5.2.6 Penanggulangan Semburan Lumpur Sidoarjo

Penanggulangan semburan lumpur Sidoarjo diperkirakan masih akan menghadapi beberapa permasalahan, diantaranya sebagai berikut.

Kondisi semburan lumpur Sidoarjo yang sudah berlangsung sejak tahun 2006 diperkirakan akan masih berlangsung lebih kurang 20-30 tahun mendatang dan kemungkinan untuk menutup semburan tingkat keberhasilannya sangat kecil karena lubang semburan telah menjadi semakin besar.

Deformasi geologi diakibatkan oleh semburan lumpur mulai pada daerah sekitar pusat semburan, berupa amblesan, retakan, *uplift* maupun timbulnya *bubble-bubble* yang mengandung gas berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Sampai dengan saat ini tercatat terdapat 123 buah *bubble* yang muncul di luar Peta Area Terdampak, yang sebanyak 12 buah *bubble* diantaranya masih dalam kondisi aktif sampai akhir September 2009 .

Tersendatnya Pembangunan Relokasi Infrastruktur. Percepatan pemulihan infrastruktur jalan arteri dan jalan tol sangat tergantung pada tersedianya lahan yang bisa dibebaskan. Sampai dengan akhir tahun anggaran 2009, masih terdapat beberapa warga pemilik tanah darat/kering yang belum sepakat dengan besaran ganti rugi dan menuntut harga yang melampaui penawaran tim *appraisal*.

Sasaran penanggulangan lumpur Sidoarjo yang ingin dicapai dalam kurun waktu 2010-2014 secara umum adalah sebagai berikut.

TABEL 5.18
SASARAN PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO 2010-2014

No	Sasaran	Indikator
1	Terselesaikannya masalah sosial kemasyarakatan	a) menyelesaikan proses pembayaran jual beli tanah dan bangunan warga di 3 Desa (Ds. Besuki, Kedungcangkring dan Pejarakan); b) melaksanakan bantuan sosial kemasyarakatan penduduk di 9 RT yang pemukimannya sudah tidak layak huni; c) melanjutkan bantuan air bersih, kesehatan, pemakaman serta pengamanan dari bahaya penurunan tanah dan semburan lumpur/gas berbahaya.

No	Sasaran	Indikator
2	Meningkatnya upaya pengaliran lumpur melalui Kali Porong menuju ke laut untuk mencegah meluasnya daerah genangan dan melindungi infrastruktur yang masih berfungsi	<ul style="list-style-type: none"> a) mengupayakan kelancaran pengaliran lumpur ke Kali Porong, termasuk dengan mengoptimalkan pemanfaatan pompa pembuang lumpur; b) memelihara kekuatan dan ketinggian tanggul penahan lumpur; c) meneruskan penyelesaian saluran drainase disepular tanggul; dan d) mempertahankan fungsi Kali Porong sebagai saluran pengendali banjir (<i>flood way</i>).
3	Terselesaikannya relokasi infrastruktur, termasuk penyelesaian pengadaan tanahnya	<ul style="list-style-type: none"> a) menyelesaikan pengadaan tanah untuk jalur jalan tol, jalan arteri dan pipa air bersih; b) menyelesaikan kegiatan konstruksi Relokasi Jalan Arteri Raya Siring-Porong (Paket 1, 2, 3 dan 4); c) melaksanakan pembangunan <i>interchange flyover</i> Kesambi; d) melaksanakan pembangunan relokasi pipa PDAM.

5.3 Strategi Dan Arah Kebijakan Pembangunan Bidang Sarana Dan Prasarana

Berdasarkan identifikasi permasalahan dan sasaran di atas, pembangunan bidang sarana dan prasarana diprioritaskan pada penyediaan infrastruktur dasar agar dapat menjamin baik keberlangsungan fungsi masyarakat atau rumah tangga, maupun dunia usaha dalam rangka mewujudkan kesejahteraan, memperkecil kesenjangan, dan mewujudkan keadilan. Infrastruktur dasar merupakan sarana prasarana yang harus disediakan oleh pemerintah karena tidak memiliki aspek komersial, sedangkan infrastruktur yang memiliki nilai komersial diharapkan dibiayai melalui partisipasi pihak swasta ataupun masyarakat melalui mekanisme *unbundling* maupun *dual track strategy*.

Penyediaan infrastruktur dasar diprioritaskan untuk menjamin akses masyarakat terhadap jasa kegiatan infrastruktur, seperti air bersih, sanitasi, perumahan, transportasi, listrik serta informasi dengan harga terjangkau bagi seluruh masyarakat, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah; meningkatkan pembangunan telekomunikasi pita lebar untuk mendekatkan jarak fisik yang berjauhan mengingat negara Indonesia adalah negara kepulauan; serta pengelolaan sungai beserta daerah tangkapan air, seperti pembangunan Banjir Kanal Jakarta dan penanganan Daerah Aliran Sungai Bengawan Solo untuk mengatasi bencana alam banjir di berbagai daerah.

Dalam rangka meningkatkan daya saing produk nasional, penyediaan sarana dan prasarana diprioritaskan pada terjaminnya kelancaran distribusi barang, jasa, dan informasi, diantaranya adalah dengan melakukan penataan sistem logistik nasional melalui penyusunan rencana induk pelabuhan nasional; mengurangi hambatan-hambatan dalam arus distribusi barang dan jasa baik yang bersifat teknis maupun nonteknis; menangani arus barang di dalam pelabuhan, antar-pelabuhan, serta proses intermoda antara angkutan laut dan moda lainnya, dengan tetap memenuhi standar

keselamatan dan keamanan pelayaran internasional. Disamping itu, untuk menjamin kelancaran arus informasi dan komunikasi diperlukan pengembangan jaringan *backbone* telekomunikasi antarpulau dan antaribukota kabupaten/kota.

Berdasarkan kondisi sarana dan prasarana di atas, maka prioritas bidang pembangunan sarana dan prasarana lima tahun ke depan adalah ***pertama, menjamin ketersediaan infrastruktur dasar untuk mendukung peningkatan kesejahteraan***, yang difokuskan pada peningkatan pelayanan sarana dan prasarana sesuai dengan standar pelayanan minimal (SPM). Sasaran fokus prioritas adalah terjaminnya ketersediaan infrastruktur dasar sesuai dengan tingkat kinerja yang telah ditetapkan, dengan indikator presentase tingkat pelayanan sarana dan prasarana yang meliputi sarana dan prasarana sumber daya air, transportasi, perumahan dan permukiman, energi, dan ketenagalistrikan, serta komunikasi dan informatika.

Kedua, menjamin kelancaran distribusi barang, jasa, dan informasi untuk meningkatkan daya saing produk nasional, yang difokuskan untuk: (i) mendukung peningkatan daya saing sektor riil dan (ii) meningkatkan kerjasama pemerintah dan swasta (KPS). Sasaran fokus prioritas adalah meningkatnya pelayanan sarana dan prasarana yang mendukung sektor riil, dengan indikator presentase peningkatan kapasitas dan kuantitas pelayanan sarana dan prasarana yang meliputi sarana dan prasarana sumber daya air, transportasi, perumahan dan permukiman, energi dan ketenagalistrikan, serta komunikasi dan informatika.

Penyediaan infrastruktur dengan skema KPS diarahkan untuk infrastruktur yang dapat memenuhi pemulihan biaya melalui struktur tarif yang mempertimbangkan aspek sosio-ekonomi dan kemampuan daya beli masyarakat, sehingga memungkinkan adanya subsidi silang bagi tingkat konsumen tertentu, yang tidak memiliki kemampuan membayar layanan. Di samping itu, pemerintah juga dapat memberikan subsidi yang merupakan kewajiban pemerintah (*PSO*) kepada penyedia jasa infrastruktur untuk mencapai standar pelayanan minimum tertentu yang akan dicapai. Hal tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesinambungan pelayanan infrastruktur dan akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kerjasama pemerintah swasta yang diselenggarakan melalui kompetisi yang adil, terbuka dan transparan akan meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan infrastruktur yang berkesinambungan dan akan menurunkan tarif pelayanan infrastruktur. Seiring dengan semakin terjangkaunya layanan infrastruktur oleh konsumen, peningkatan kuantitas dan perluasan pelayanan akan semakin mudah dicapai oleh penyedia jasa. Tersedianya infrastruktur yang murah, handal, dan berkelanjutan akan menurunkan biaya produksi dan distribusi barang, jasa, dan informasi untuk meningkatkan daya saing produk nasional.

Secara sistematis, kerangka pikir prioritas Bidang Sarana dan Prasarana dapat dilihat pada Gambar 5.20 berikut:

GAMBAR 5.20
KERANGKA PIKIR PRIORITAS BIDANG SARANA DAN PRASARANA



Sumber : Deputi Bidang Sarana dan Prasarana – Bappenas, 2009.

Secara lebih rinci arah kebijakan berdasarkan fokus prioritas diatas dapat diuraikan sebagai berikut :

5.3.1 Meningkatkan Pelayanan Sarana Dan Prasarana Sesuai Dengan Standar Pelayanan Minimal

5.3.1.1 Sumber Daya Air

Peningkatan pelayanan sarana dan prasarana sumber daya air sesuai dengan standar pelayanan minimal ditempuh melalui peningkatan cakupan dan kualitas layanan air baku, peningkatan kapasitas kelembagaan, serta peningkatan ketersediaan dan kemudahan data dan informasi.

Peningkatan cakupan dan kualitas layanan air baku secara optimal, berkelanjutan, adil, dan merata, akan ditempuh dengan: (a) memprioritaskan pemenuhan air untuk kebutuhan pokok rumah tangga terutama di wilayah defisit air, wilayah tertinggal, wilayah strategis, pulau-pulau kecil dan terdepan, kawasan terpencil serta daerah perbatasan; (b) mengoptimalkan pemanfaatan air tanah untuk pemenuhan kebutuhan air baku dengan tetap memperhatikan kaidah-kaidah ekologi dan kelestarian

lingkungan; (c) membangun tampungan air (tandon, embung, kolam, situ, long storage) dan saluran pembawa air baku untuk memenuhi target MDG; (d) mendorong partisipasi swasta dalam pembiayaan pembangunan sarana dan prasarana air baku terutama sistem penyaluran air (conveyance system) untuk kota besar dan industri; (e) menerapkan prinsip-prinsip reduce, reuse, dan recycle untuk mewujudkan efisiensi pemanfaatan air; (f) mengembangkan dan menerapkan teknologi pengolahan air yang murah dan ramah lingkungan sesuai dengan kaidah-kaidah eco efficient; (g) mengembangkan sistem inter basin transfer dalam pemenuhan kebutuhan air baku; (h) mendorong penetapan kebijakan biaya jasa pengelolaan air yang mengutamakan prinsip-prinsip keadilan dan mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan air bagi masyarakat miskin; serta (i) meningkatkan pengelolaan dan penyediaan air untuk kepentingan pembangkit tenaga listrik.

Peningkatan kapasitas kelembagaan, ketatalaksanaan, dan keterpaduan dalam pengelolaan sumber daya air ditempuh dengan: (a) mempercepat penyelesaian peraturan perundangan turunan UU No. 7 Tahun 2004 serta penyusunan Norma, Standar, Pedoman dan Manual (NSPM) sebagai pedoman teknis pelaksanaan dan koordinasi pengelolaan sumber daya air; (b) melakukan penataan dan pengaturan kembali kewenangan dan tanggung jawab di semua tingkat pemerintahan beserta seluruh pemangku kepentingan serta menjalankannya secara konsisten; (c) meningkatkan kemampuan komunikasi, kerjasama, dan koordinasi antarlembaga serta antarwadah koordinasi pengelolaan sumber daya air yang telah terbentuk; (d) meningkatkan kapasitas kelembagaan pengelolaan sumber daya air; (e) menumbuhkan prakarsa dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam setiap upaya pengelolaan sumber daya air melalui proses pendampingan, penyuluhan dan pembinaan; serta (f) menyelenggarakan upaya pengelolaan sumber daya air dengan sistem kemitraan antara pemerintah dan masyarakat.

Peningkatan ketersediaan dan kemudahan akses terhadap data dan informasi dalam pengelolaan sumber daya air yang terpadu, efektif, efisien dan berkelanjutan ditempuh dengan: (a) mendorong terbentuknya jaringan informasi sumber daya air antarpemangku kepentingan (b) membangun dan mengoptimalkan jaringan basis data dan menetapkan standar, kodifikasi, klasifikasi, proses dan metode/prosedur pengumpulan data dan informasi; (c) melakukan pengumpulan, pembaharuan dan sinkronisasi data dan informasi secara rutin antarinstansi; dan (d) menyusun dan menerapkan prosedur operasi standar tentang keterbukaan data dan informasi kepada masyarakat serta meningkatkan pelayanan informasi masyarakat.

5.3.1.2 Transportasi

Untuk mencapai sasaran dalam rangka meningkatkan pelayanan sarana dan prasarana transportasi sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM), maka prioritas arah kebijakan dan strategi yang menjadi pengarusutamaan adalah meningkatkan keselamatan dan kualitas pelayanan transportasi secara komprehensif dan terpadu dari

berbagai aspek (pencegahan, pemenuhan kelengkapan navigasi pelayaran dan udara, rambu-rambu lalu lintas, sistem persinyalan kereta api, pembinaan dan penegakan hukum, penanganan dampak kecelakaan dan daerah rawan kecelakaan, sistem informasi kecelakaan lalu lintas, kelaikan sarana dan prasarana transportasi, serta pengguna transportasi).

Peningkatan pelayanan transportasi minimal yang memadai dan merata juga menjadi prioritas guna mewujudkan sistem logistik nasional yang menjamin distribusi bahan pokok, bahan strategis dan nonstrategis untuk seluruh masyarakat melalui penyediaan pelayanan angkutan (termasuk angkutan perintis) dari dan menuju di daerah perdesaan. Pengembangan sarana dan prasarana transportasi perdesaan diprioritaskan untuk memperkuat Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), sehingga target area diarahkan pada pusat-pusat pertumbuhan (Kawasan Khusus, KAPET, Kawasan Kerjasama Antar Daerah, dll). Sementara, daerah-daerah yang menjadi prioritas pembangunan adalah daerah perbatasan dengan negara tetangga, pulau terpencil dan terdepan melalui pemberian subsidi transportasi perintis serta *PSO* untuk angkutan penumpang kelas ekonomi perkeretaapian dan angkutan laut.

Selain arah kebijakan di atas, kebijakan yang terkait dengan standar pelayanan Minimal, antara lain:

1. mengurangi *backlog* pemeliharaan prasarana dan sarana transportasi;
2. meningkatkan kondisi pelayanan prasarana jalan sesuai dengan standar pelayanan minimal;
3. meningkatkan profesionalisme SDM transportasi (petugas, disiplin operator dan pengguna di jalan), melalui pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan, serta pembinaan teknis tentang pelayanan operasional transportasi;
4. mendukung pengembangan transportasi yang berkelanjutan dalam rangka mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
5. membenahi manajemen transportasi umum perkotaan; serta
6. meningkatkan kemampuan dan kecepatan tindak awal pencarian dan penyelamatan (SAR) terhadap orang dan material yang hilang atau dikhawatirkan hilang, atau menghadapi bahaya dalam pelayaran dan atau penerbangan, serta memberikan bantuan SAR dalam penanggulangan bencana dan musibah lainnya.

Strategi untuk pelaksanaan arah kebijakan tersebut adalah: (a) memenuhi standar keselamatan dan keamanan pelayaran dan penerbangan yang dikeluarkan baik oleh *International Civil Aviation Organization* (ICAO), *International Maritime Organization* (IMO) maupun oleh *International Association of Light House Authorities* (IALA) termasuk di dalamnya pelaksanaan *ISPS Code*; (b) pemberian subsidi operasi

perintis dan PSO untuk pelayanan jasa transportasi kelas ekonomi; (c) pengembangan sarana dan prasarana transportasi di wilayah terpencil, pedalaman dan perbatasan; (d) memenuhi kelengkapan peralatan pencarian dan penyelamatan; serta (e) melakukan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dengan mendorong kegiatan-kegiatan seperti: pengembangan angkutan umum melalui perbaikan pelayanan dan *bus rapid transit* di daerah-daerah; penerapan *Area Traffic Control System (ATCS)* dan penggunaan *sollar cell* pada *traffic light*; penggunaan bahan bakar alternatif serta sosialisasi penggunaan *biofuel* yang bekerjasama dengan Departemen ESDM; pengembangan teknologi untuk pengaturan manajemen lalu lintas; pemanfaatan teknologi kendaraan *hybrid*; penerapan *road pricing* di wilayah metropolitan; meningkatkan kontrol emisi bahan bakar; meningkatkan fasilitas *pedestrian* dan penggunaan kendaraan *non motorized*; penyusunan *Eco Port Guidelines* dan *Eco Airport Guidelines*; serta pengurangan kebisingan angkutan udara.

5.3.1.3 Perumahan dan Permukiman

Dengan memperhatikan berbagai kondisi umum, permasalahan dan sasaran di atas, akan dikembangkan berbagai arah kebijakan sebagai berikut:

1. Meningkatkan aksesibilitas masyarakat berpenghasilan rendah terhadap hunian yang layak dan terjangkau, dengan:
 - a. meningkatkan penyediaan hunian yang layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah melalui (a) pembangunan 650 *twin block* rusunawa; (b) pembangunan 685.000 unit Rumah Sederhana Sehat Bersubsidi; (c) fasilitasi pembangunan 180 tower rusunami melalui peran swasta; (d) penyediaan prasarana, sarana dan utilitas pengembangan kawasan perumahan antara lain untuk mendukung pengembangan kota baru (*New Town Development*); (e) fasilitasi pembangunan baru/peningkatan kualitas perumahan swadaya serta penyediaan prasarana, sarana dan utilitas perumahan swadaya; (f) pembangunan rumah khusus termasuk rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan pasca bencana; (g) fasilitasi penyediaan lahan; (h) pemanfaatan dan pengembangan sumber daya lokal, teknologi dan penelitian di bidang perumahan dan permukiman.
 - b. meningkatkan aksesibilitas masyarakat berpenghasilan menengah-bawah terhadap hunian yang layak dan terjangkau melalui: (a) penyediaan subsidi perumahan; (b) pengembangan fasilitasi likuiditas; (c) peningkatan mobilisasi sumber-sumber dana jangka panjang; dan (d) pengembangan tabungan perumahan nasional.
 - c. meningkatkan kualitas lingkungan permukiman melalui penyediaan prasarana, sarana dasar, dan utilitas umum yang memadai dan terpadu dengan pengembangan kawasan perumahan dalam rangka mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh.

- d. meningkatkan jaminan kepastian hukum dalam bermukim (secure tenure) melalui fasilitasi pra-sertifikasi dan pendampingan paska-sertifikasi tanah bagi masyarakat berpenghasilan rendah; serta standardisasi perijinan dalam membangun rumah.
 - e. meningkatkan kenyamanan, keamanan dan keselamatan bangunan gedung melalui pengawasan dan pembinaan teknis standar bangunan gedung serta peningkatan keserasiannya dengan tata ruang dan lingkungan.
 - f. meningkatkan kualitas perencanaan dan penyelenggaraan pembangunan perumahan dan permukiman melalui (a) pengembangan regulasi dan kebijakan; (b) pemberdayaan dan kemitraan pelaku pembangunan perumahan dan permukiman; (c) peningkatan kapasitas dan koordinasi berbagai pemangku kepentingan pembangunan perumahan dan permukiman; (d) pengembangan pengelolaan aset (property management); (e) serta fasilitasi penyusunan rencana induk pengembangan permukiman daerah.
 - g. memantapkan pasar primer dan pembiayaan sekunder perumahan yang didukung oleh sumber pembiayaan jangka panjang yang berkelanjutan melalui pengembangan informasi dan standardisasi KPR; serta pengembangan peraturan perundangan pendukungnya.
2. Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap layanan air minum dan sanitasi yang memadai, melalui
- a. menyediakan perangkat peraturan di tingkat Pusat dan/atau Daerah untuk mendukung pelayanan air minum, air limbah dan persampahan, melalui penambahan, revisi, maupun deregulasi peraturan perundang-undangan yang diantaranya adalah penyusunan peraturan pendukung Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.
 - b. memastikan ketersediaan air baku air minum, melalui pengendalian penggunaan air tanah oleh pengguna domestik maupun industri; perlindungan sumber air tanah dan permukaan dari pencemaran domestik melalui peningkatan cakupan pelayanan sanitasi; serta pengembangan dan penerapan teknologi pemanfaatan sumber air alternatif termasuk air reklamasi;
 - c. meningkatkan prioritas pembangunan prasarana dan sarana permukiman (air minum dan sanitasi), melalui peningkatan kesadaran semua pihak akan pentingnya pembangunan prasarana dan sarana permukiman serta peningkatan koordinasi antarpemangku kepentingan dalam pengarusutamaan pembangunan prasarana dan sarana permukiman;
 - d. meningkatkan kinerja manajemen penyelenggaraan air minum, penanganan air limbah, dan pengelolaan persampahan melalui (a) penyusunan *business plan*, penerapan korporatisasi, pelaksanaan manajemen aset, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, baik yang dilakukan oleh

institusi maupun masyarakat; (b) peningkatan kerja sama antarpemerintah, antara pemerintah dengan masyarakat, antara pemerintah dengan swasta, ataupun antara pemerintah, swasta dan masyarakat; (c) peningkatan keterkaitan antara sistem pengelolaan yang dilakukan oleh masyarakat dengan pemerintah; dan (d) optimalisasi pemanfaatan sumber dana. Khusus bagi pengelolaan persampahan, perbaikan layanan pengelolaan persampahan dilakukan melalui (a) minimasi sampah yang tidak terangkut ke TPS (Tempat Pengolahan Sampah Sementara); (b) meningkatkan penggunaan sistem pengolahan sampah alternatif; (c) optimalisasi penggunaan TPA regional; dan (d) penerapan sistem *sanitary landfill* pada TPA. Adapun peningkatan kinerja pengelolaan drainase dilakukan melalui penegasan kewenangan dan tanggung jawab lembaga pengelola drainase; serta penerapan manajemen aset dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

- e. meningkatkan sistem perencanaan pembangunan air minum dan sanitasi, melalui penyusunan rencana induk sistem penyediaan air minum (RIS-SPAM) sesuai prinsip-prinsip pembangunan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat maupun lembaga; penyusunan Strategi Sanitasi Kota (SSK) yang selaras dengan RIS-SPAM; penyusunan rencana induk sistem pengelolaan persampahan; penyusunan rencana induk sistem pengelolaan drainase; serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaannya;
- f. meningkatkan cakupan pelayanan air minum, air limbah, persampahan dan drainase melalui optimalisasi sistem yang ada; percepatan penambahan kapasitas sistem dan sambungan rumah air minum, baik berbasis masyarakat maupun lembaga; peningkatan pemanfaatan teknologi tepat guna; pengelolaan pemanfaatan air minum menggunakan instrumen tarif; percepatan pembangunan sanitasi perkotaan maupun perdesaan yang terdiri dari pengembangan sistem air limbah terpusat (*off-site*) skala kota maupun komunal, peningkatan pengelolaan sistem air limbah setempat (*on-site*), penanganan air limbah berbasis masyarakat tanpa subsidi, peningkatan pemanfaatan teknologi tepat guna; penambahan kapasitas pengangkutan sampah menuju TPS maupun TPA; pembangunan TPA baru dengan sistem *sanitary landfill*; dan pembangunan saluran drainase terutama di kawasan strategis perkotaan.
- g. Meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), melalui pembangunan prasarana dan sarana air minum dan sanitasi di sekolah sebagai bagian dari upaya peningkatan sosialisasi perilaku yang higienis bagi siswa sekolah dan penerapan praktik perilaku hidup bersih dan sehat oleh masyarakat; serta meningkatkan kepedulian dan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan saluran drainase mikro.

- h. Mengembangkan alternatif sumber pendanaan bagi pembangunan air minum, air limbah dan persampahan, melalui pemberian subsidi tarif dalam bentuk PSO bagi masyarakat berpenghasilan rendah; pemberian jaminan kredit dan subsidi selisih bunga pada pinjaman PDAM; pemberian insentif berbasis kinerja (*output based aid*) bagi pemerintah daerah yang lebih memprioritaskan pembangunan air minum dan air limbah; pemberian hibah imbal balik (*matching grant*) bagi pemerintah daerah yang lebih memprioritaskan pembangunan sanitasi; penerbitan instrumen keuangan melalui pasar modal; pengembangan skema-skema pembiayaan yang berasal dari dana masyarakat; serta pemberian insentif fiskal dan non fiskal bagi dunia usaha yang terlibat dalam pembangunan air minum, air limbah dan persampahan. Menyediakan sumber pendanaan bagi pengembangan sistem drainase serta operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana drainase yang memadai.
- i. meningkatkan keterlibatan masyarakat dan swasta dalam pengelolaan persampahan, pada (a) upaya pengurangan timbulan sampah mulai dari sumbernya melalui penerapan prinsip 3 R (*reuse, reduce and recycle*), dan mendorong swasta untuk menggunakan kemasan pembungkus yang ramah lingkungan; serta (b) upaya pengelolaan persampahan secara profesional, melalui pemasaran bisnis persampahan pada masyarakat dan swasta; dan pentahapan (*unbundling*) pengelolaan persampahan sehingga menarik bagi masyarakat dan swasta
- j. mengurangi volume air limpasan, melalui penyediaan bidang resapan, baik oleh masyarakat maupun pemerintah daerah.

5.3.1.4 Komunikasi dan Informatika

Arah kebijakan yang ditempuh dan terkait dengan **Fokus Peningkatan Pelayanan Sarana dan Prasarana Sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM)** adalah sebagai berikut

1. **Pemerataan penyediaan sarana, prasarana, dan layanan komunikasi dan informatika** dengan strategi antara lain: (a) kerjasama dengan penyelenggara komunikasi dan informatika dalam memetakan daerah *blank spot* yang dituangkan dalam rencana induk *National Border Information Belt* dan rencana induk Desa Informasi; (b) pengalokasian APBN dan pemberian subsidi secara tepat sasaran (*target oriented*); (c) peningkatan efisiensi dan manfaat layanan melalui integrasi dan sinergi kegiatan yang sejenis baik di internal sub bidang komunikasi dan informatika maupun lintas sub bidang; dan (d) peningkatan kerja sama dengan badan usaha yang dipilih melalui proses yang kompetitif dan transparan dalam pembangunan dan penyelenggaraan komunikasi dan informatika di wilayah non komersial.

2. **Pemberdayaan informasi** dengan strategi, antara lain: (a) pengembangan konten lokal; (b) pelatihan, sosialisasi, dan edukasi untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan informasi dan TIK untuk kegiatan yang produktif; dan (c) fasilitasi komunitas informasi sebagai bentuk pemberdayaan masyarakat dalam pemanfaatan informasi dan pengawasan terhadap kepatutan konten.

5.3.1.5 Energi dan Ketenagalistrikan

Kebijakan pembangunan prasarana energi dan ketenagalistrikan terkait fokus **meningkatkan pelayanan sarana dan prasarana sesuai dengan standar pelayanan Minimal (SPM)** dalam lima tahun ke depan yang diarahkan pada kegiatan berikut.

1. Pemerintah meningkatkan jangkauan pelayanan dengan memberikan prioritas pada pemanfaatan energi terbarukan setempat untuk daerah terpencil, tertinggal, dan terluar. Kebijakan ini diperlukan untuk memperluas jangkauan pelayanan energi dan ketenagalistrikan sekaligus mengoptimalkan pemanfaatan energi alternatif, selain BBM (terutama energi terbarukan). Strategi yang dilakukan, antara lain:
 - a. pengembangan dan pemanfaatan potensi energi lokal, khususnya energi baru terbarukan (mikrohidro, surya, angin, laut dan biomassa) untuk pembangkit listrik (PLTMH, PLTS, PLTB, PLT Laut dan PLT Biomassa) untuk meningkatkan pasokan daya listrik nasional dan rasio desa berlistrik yang dilakukan melalui : (1) prioritas kegiatan pembangunan pembangkit dengan EBT di dalam RKP tahunan, berikut alokasi APBN-nya; (2) mengakomodasi hibah dan pinjaman domestik dan luar negeri yang terkait erat dengan pemanfaatan EBT; (3) fasilitasi subsidi untuk EBT dan tarif yang memberikan insentif bagi pengembangan EBT; (4) mendorong dan fasilitasi pemangku kepentingan terkait EBT khususnya otoritas fiskal untuk melaksanakan pemberian insentif bagi pengembangan EBT; (5) pelaksanaan proyek percontohan (*pilot project* maupun *demo plant*) yang berbasis pemanfaatan sumber energi terbarukan.
 - b. pengembangan Desa Mandiri Energi yang dilakukan melalui : (1) prioritas kegiatan pengembangan DME di dalam RKP tahunan, berikut alokasi APBN-nya; (2) fasilitasi *updating* data dan informasi potensi EBT yang lebih rinci; (3) fasilitasi dan prioritas kegiatan peningkatan *capacity building* dalam lingkup pengembangan DME.
 - c. pembangunan jaringan gas kota melalui: (1) pengalokasian APBN secara tepat sasaran (*target oriented*) dengan pengukuran kinerja berbasis output yang jelas dan memperhatikan keberlanjutan layanan; (2) fasilitasi dan mendorong penyelesaian permasalahan pra dan paska konstruksi jaringan gas kota; dan (3) fasilitasi kemungkinan pembentukan Badan Usaha Milik

- Negara (BUMN) untuk melaksanakan pembangunan dan pengelolaan jaringan gas kota.
- d. penetapan regulasi dan fasilitasi kebijakan yang mendukung pengembangan dan pemanfaatan energi baru dan terbarukan, hal ini dilakukan melalui penetapan RPP yang terkait UU Nomor 30 tahun 2007 tentang energi.
 - e. penguatan kelembagaan pengelolaan energi baru terbarukan, yang dilakukan dengan : (1) mendorong sektor khususnya Kementerian ESDM dalam melaksanakan restrukturisasi kelembagaan guna memberikan porsi yang lebih besar dalam pengelolaan EBT; (2) mendorong pembentukan Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi.
2. Memanfaatkan sebesar-besarnya tenaga kerja, barang dan jasa produksi dalam negeri. Kebijakan ini diperlukan untuk memberikan nilai tambah (*value added*) bagi perekonomian dalam negeri, terutama mendorong pengembangan industri dan teknologi dalam negeri. Strategi yang dilakukan antara lain adalah :
- a. penelitian dan pengembangan teknologi energi dan ketenagalistrikan termasuk energi baru terbarukan, dilakukan dengan : (1) prioritas kegiatan penelitian dan pengembangan pemanfaatan energi nasional di dalam RKP tahunan, berikut alokasi APBN-nya; (2) mendorong kerjasama dengan badan penelitian nasional maupun internasional untuk pengembangan dan penguasaan teknologi; (3) fasilitasi harmonisasi hubungan antara penelitian, dunia industri dan kebutuhan masyarakat;
 - b. penetapan regulasi dan fasilitasi kebijakan yang mendukung pemanfaatan tenaga kerja, barang dan jasa produksi dalam negeri, hal ini dilakukan dengan: (1) fasilitasi koordinasi pemangku kepentingan dalam penyusunan regulasi tentang Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN); (2) pelaksanaan kewajiban minimum TKDN serta pemberian insentif dan disentif terhadap pelaksanaan TKDN; (3) keberpihakan kepada perusahaan nasional dengan memberikan preferensi, insentif, aliansi strategis (kemitraan), serta proteksi.

5.3.1.6 Penanggulangan Semburan Lumpur Sidoarjo

Dalam rangka meningkatkan pelayanan sarana dan prasarana sesuai dengan standar pelayanan minimal, kebijakan penanggulangan semburan lumpur sidoarjo ditempuh melalui:

1. peningkatan kualitas penyusunan perencanaan pengaliran lumpur ke Kali Porong;
2. terlaksananya pengaliran luapan lumpur ke Kali Porong;
3. peningkatan kemampuan penyediaan data/informasi fenomena geologi dan penanganan bencana geologi;

4. peningkatan kualitas penyusunan rencana di bidang sosial kemasyarakatan;
5. terselenggaranya bantuan sosial kemasyarakatan warga terdampak akibat semburan dan luapan lumpur Sidoarjo;
6. terselenggaranya perlindungan sosial terhadap warga terdampak akibat semburan dan luapan lumpur Sidoarjo.

5.3.2 Mendukung peningkatan daya saing sektor riil

5.3.2.1 Sumber Daya Air

Kebijakan pengelolaan sumber daya air untuk mendukung peningkatan daya saing sektor riil ditempuh melalui peningkatan dan pelestarian keberlanjutan ketersediaan air, peningkatan layanan jaringan irigasi/rawa, pengendalian dan pengurangan dampak banjir dan tanah longsor, serta pengamanan pantai dari erosi dan abrasi.

1. Peningkatan dan pelestarian sumber-sumber air untuk menjaga kuantitas dan kualitas pasokan air ditempuh dengan: (1) meningkatkan hubungan kerjasama hulu-hilir daerah aliran sungai dalam mencapai pengelolaan sumber daya air yang lebih berkeadilan; (2) penanganan danau-danau secara terpadu dan berkelanjutan; (3) mempercepat pembangunan tampungan-tampungan air skala kecil/menengah (embung, waduk lapangan, kolam, dan situ) terutama di daerah selatan khatulistiwa dan wilayah-wilayah strategis; serta (4) mengendalikan pencemaran air akibat pembuangan limbah domestik dan industri dengan meningkatkan pemantauan kualitas air serta upaya penegakan hukum.
2. Peningkatan layanan jaringan irigasi/rawa untuk mendukung ketahanan pangan nasional ditempuh dengan: (1) membangun daerah irigasi baru dengan prioritas di luar pulau Jawa serta meningkatkan fungsi jaringan irigasi, terutama pada areal yang ketersediaan airnya terjamin dan petani penggarapnya sudah siap; (2) merehabilitasi jaringan irigasi yang mengalami kerusakan, terutama pada daerah lumbung pangan nasional; (3) optimalisasi layanan irigasi melalui operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi; (4) meningkatkan peran petani secara langsung dalam kegiatan operasi dan pemeliharaan melalui sistem *out-contracting*; (5) meningkatkan efisiensi pemanfaatan air irigasi dengan teknologi pertanian hemat air seperti *System of Rice Intensification/SRI*, menggunakan kembali air buangan dari sawah (*water re-use*), *lining* saluran irigasi untuk mengurangi kebocoran air, mempertahankan fungsi lahan pertanian, serta mendukung pemerintah daerah dalam meningkatkan keandalan jaringan irigasi, melalui penyediaan dana alokasi khusus (DAK).
3. Pengendalian dan pengurangan dampak banjir dan tanah longsor secara struktural dan non struktural, terutama pada wilayah berpenduduk padat, wilayah strategis dan pusat-pusat perekonomian, ditempuh dengan: (a)

penyelesaian Banjir Kanal Timur serta sarana dan prasarana pengendali banjir secara terintegrasi di wilayah DKI Jakarta; (b) penanganan terpadu Wilayah Sungai Bengawan Solo, untuk mengendalikan banjir, meningkatkan ketersediaan air serta mengembangkan layanan irigasi; (c) menerapkan pendekatan *flood management* (pencegahan, penanggulangan dan penanganan); (d) meningkatkan kinerja sarana dan prasarana pengendali banjir melalui optimalisasi kinerja operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi; (e) revitalisasi fungsi sungai dan menerapkan prinsip *eco-hydraulic* sebagai wujud perubahan paradigma dari 'perbaikan sungai' menjadi 'pengelolaan sungai'; (f) memperbaiki sistem drainase makro dan mikro daerah perkotaan; g) mendorong kebijakan pembangunan area parkir air (*retention/retarding basin*); (h) mengurangi laju erosi dengan pembangunan pengendali sedimen; serta (i) meningkatkan upaya pengamanan tampungan-tampungan air untuk mencegah kegagalan dan kerusakan bangunan.

4. Pengamanan pantai dari abrasi dan erosi, terutama pada wilayah berpenduduk padat, wilayah strategis, daerah pariwisata dan pusat-pusat perekonomian ditempuh dengan: (1) meningkatkan pembangunan pengaman pantai dan optimalisasi fungsi pengaman pantai yang telah ada; (2) menetapkan zona-zona pantai prioritas yang terdampak langsung oleh kenaikan muka air laut akibat perubahan iklim; (3) inisiasi pembangunan Sea Defence dan Polder System terutama di Pantai Utara Pulau Jawa; (4) membangun pengaman pantai pada pulau-pulau terdepan untuk menjaga keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI); dan (5) adaptasi terhadap perubahan iklim dengan penyesuaian parameter desain bangunan pengaman pantai dan pengendali banjir.

5.3.2.2 Transportasi

Untuk mengatasi ketertinggalan transportasi Indonesia dari negara lain, kebijakan yang mendukung peningkatan daya saing sektor riil diprioritaskan dalam menciptakan sistem logistik nasional yang menjamin kelancaran distribusi barang di seluruh wilayah Indonesia melalui pembangunan dan pengembangan gerai-gerai pelabuhan beserta sarana pendukungnya. Di samping itu, kebijakan tersebut perlu didukung oleh sistem informasi muatan barang (*cargo information system*) yang andal, implementasi *National Single Window* di pelabuhan serta pengembangan armada pelayaran nasional yang mempertimbangkan peta asal dan tujuan logistik nasional. Sementara itu, untuk melengkapi jaringan distribusi hingga sampai kepada masyarakat perlu dikembangkan sarana dan prasarana penghubung antarpulau dan antarmoda yang terintegrasi sesuai dengan sistem transportasi nasional dan cetak biru transportasi multimoda.

Pembangunan sarana dan prasarana transportasi perkotaan diprioritaskan dalam rangka menopang peran perkotaan sebagai pusat-pusat pertumbuhan ekonomi

nasional. Prioritas utamanya adalah mengembangkan sistem transportasi massal berbasis rel terutama untuk kota-kota besar, serta perbaikan sistem dan jaringan transportasi sesuai dengan Cetak Biru Transportasi Perkotaan.

Di samping itu, arah kebijakan pembangunan transportasi lainnya yang terkait peningkatan daya saing sektor riil, antara lain adalah

1. meningkatkan kualitas dan kapasitas pelayanan transportasi untuk mendukung kelancaran distribusi barang dan jasa serta mendukung pengembangan daerah pariwisata dan sentra-sentra produksi pertanian dan industri;
2. mendorong efisiensi transportasi barang dan penumpang terutama dari aspek penegakan hukum, deregulasi pungutan dan retribusi di jalan, penataan jaringan dan ijin trayek;
3. meningkatkan strategi pelayanan angkutan yang lebih berdaya saing secara antarmoda dan intermoda;
4. meningkatkan kelancaran, kapasitas dan kualitas pelayanan pada lintas dan koridor yang telah jenuh dan kesinambungan transportasi darat yang terputus di dalam pulau (sungai dan danau) dan antarpulau dengan pelayanan *point to point*;
5. mengembangkan transportasi umum massal di perkotaan yang terjangkau dan efisien berbasis rel di wilayah metropolitan dan berbasis bis di wilayah perkotaan; serta
6. memenuhi perkembangan teknologi dan ketentuan internasional.

Strategi untuk pelaksanaan arah kebijakan tersebut adalah: (1) membangun sarana dan prasarana transportasi di wilayah cepat tumbuh; (2) membangun sistem pelayanan terpadu (*National Single Window*) di pelabuhan-pelabuhan utama, pembangunan jalan akses pelabuhan dan bandara, penerapan konsep *Customs Advanced Trade System (CATS)* dan *dry port*; (3) membangun sarana dan prasarana berbasis subsektor dan per pulau; (4) menyelesaikan masterplan transportasi per pulau; (5) menunjang program pembangunan pembangkit listrik 10.000 Mega Watt; (6) mengembangkan sarana dan prasarana perkotaan yang terpadu dengan pengembangan wilayah; serta (7) mengembangkan jaringan pelayanan penyeberangan sebagai penghubung jalur jalan yang terputus di perairan, terutama pada lintasan ASDP di Sabuk Selatan (Sumatera-Jawa-Bali-NTB-NTT).

5.3.2.3 Komunikasi dan Informatika

Arah kebijakan yang terkait dengan **Fokus Dukungan Sarana dan Prasarana Bagi Peningkatan Daya Saing Sektor Riil** adalah sebagai berikut

1. **Restrukturisasi penyelenggaraan ke arah konvergensi** dengan strategi (1) penataan ulang struktur organisasi (K/L) dari orientasi vertikal menjadi horizontal; (2) perkuatan dan harmonisasi tugas, fungsi, dan kewenangan badan

regulasi untuk menghindari adanya multi regulator yang saling bertentangan; (3) evaluasi struktur industri, pengkajian kembali peraturan perundang-undangan yang berbasis sektoral dan saling tidak sejalan, serta penyusunan peraturan perundang-undangan yang berbasis konvergensi termasuk Rencana Induk (*Roadmap*) Pengembangan TIK Nasional; serta (4) fasilitasi *streamlining* industri dan konsolidasi penyelenggara TIK, serta revitalisasi kelembagaan, pengelolaan, dan sarana prasarana LPP TVRI dan RRI dalam menghadapi era penyiaran digital dan konvergensi.

2. **Optimalisasi sumber daya (*resources*) dalam pengembangan sarana dan prasarana dan layanan komunikasi dan informatika dengan** strategi (1) pengelolaan sumber daya terbatas (spektrum dan non spektrum) termasuk *spectrum refarming*, dan pemantauan spektrum frekuensi radio di kawasan perbatasan negara; (2) penerapan Biaya Hak Penggunaan (BHP) Frekuensi berbasis pita untuk mencerminkan nilai keekonomiannya, beserta fasilitasi proses transisi; (3) adopsi sistem perizinan berbasis teknologi netral dengan tetap menjaga interoperabilitas; (4) pemanfaatan dan pengembangan aplikasi berbasis *open source* untuk mempercepat proses *roll out*; (5) pengembangan industri TIK dalam negeri tanpa proteksi yang berlebihan di antaranya untuk mendukung implementasi *broadband wireless access* dan TV digital; (6) implementasi konsep *infrastructure sharing* dan *site sharing (co-location)* berbasis *open access* untuk efisiensi investasi serta mendorong pergeseran dari belanja modal menjadi belanja operasi; (7) pemanfaatan APBN secara efisien dan efektif untuk mendorong penyediaan, pendistribusian, dan pemanfaatan informasi terutama di wilayah non komersial melalui penggeseran konsep *asset-based* menjadi *service/output-based*; (8) pembentukan *ICT Fund*, yang merupakan dana jangka panjang dan optimalisasi pemanfaatan PNPB yang dihasilkan oleh sub bidang komunikasi dan informatika termasuk dana USO, untuk pengembangan *broadband*, inovasi, industri TIK dalam negeri, dan peningkatan kualitas SDM TIK; serta (9) pemberdayaan masyarakat (*community-based empowerment*) melalui pemberian edukasi dan bimbingan teknis terutama dalam pengembangan konten lokal.
3. **Pengembangan sarana dan prasarana *broadband*** dengan (1) pembangunan jaringan *backbone* yang terintegrasi dan menjangkau kabupaten/kota; (2) mendorong terjadinya kompetisi dalam penyelenggaraan *wireline broadband*; (3) pengembangan kerja sama antara pemerintah dan swasta dalam pembangunan *wireline broadband* dengan pengalokasian risiko yang proporsional; (4) pemberian insentif/stimulus baik berbentuk *tangible* maupun *intangible* untuk mempercepat penetrasi *wireline broadband*; (5) peningkatan penyerapan *broadband* melalui perluasan penyediaan komputer/akses internet serta pengembangan aplikasi dan konten lokal; (6) optimalisasi penggunaan spektrum frekuensi radio; serta (7) stimulasi industri perangkat *broadband* dalam negeri.

4. **Penyelenggaraan sistem elektronik¹¹ instansi pemerintah pusat dan daerah (*e-government*)** dengan strategi (1) peningkatan pemahaman dan komitmen pimpinan instansi pemerintah dalam penyelenggaraan *e-government* menuju *good governance*; (2) pendistribusian¹² aplikasi dasar layanan publik yang sudah terbukti (*proven*) baik kepada seluruh instansi pemerintah pusat dan daerah untuk mempercepat *roll out* aplikasi dan sistem, serta menjamin interoperabilitas; (3) pemanfaatan *open source software* di seluruh instansi pemerintah; (4) pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana dan aplikasi dasar *e-government* yang dapat digunakan bersama (*sharing*); (5) penetapan standar dan pelaksanaan audit TIK untuk memastikan keabsahan, kehandalan, dan kesesuaian dengan standar yang berlaku; (6) peningkatan keamanan jaringan dan pemanfaatan TIK baik melalui instrumen fisik (sarana dan prasarana) dan nonfisik (peraturan, kelembagaan, dan kerja sama dengan berbagai pihak) untuk menciptakan sarana dan prasarana dan layanan TIK yang handal dan aman (*secured*); serta (7) penyediaan bimbingan teknis pengembangan *e-government* untuk pemerintah daerah.
5. **Menjamin keterhubungan (interoperabilitas/interkoneksi) data/informasi, jaringan, dan layanan** dengan strategi yang ditempuh adalah: (1) pengembangan standar dengan memperhatikan kesepakatan/standar internasional dan open standar; (2) pengembangan sertifikasi; serta (3) pemantauan dan penertiban pelaksanaan standarisasi dan sertifikasi.
6. **Mendorong kreativitas dan inovasi di bidang TIK** dengan strategi (1) memfasilitasi kegiatan penelitian dan pengembangan, pemberian insentif, dan penyediaan inkubasi untuk mendorong pengembangan konten lokal, aplikasi, dan industri penunjang TIK dalam negeri; (2) memfasilitasi terbentuknya kerja sama antara lembaga pendidikan, lembaga penelitian, dan industri (*education-research-industry collaboration*); (3) memberikan perlindungan atas hak kekayaan intelektual; (4) mendorong pengembangan industri kreatif dan penyerapan tenaga kerja TIK sehingga tidak terjadi *brain drain*; serta (5) mendorong tercapainya komitmen TKDN dalam penyelenggaraan komunikasi dan informatika.
7. **Peningkatan kualitas sumber daya manusia TIK** dengan strategi (1) penetapan *Chief Information Officer* (CIO) di setiap instansi pemerintah; (2) pembangunan pusat pendidikan dan pelatihan TIK; (3) pelatihan komunikasi dan informatika berbasis kompetensi kerja; (4) fasilitasi komunitas informasi sebagai bentuk pemberdayaan masyarakat dalam pemanfaatan informasi dan pengawasan terhadap kepatutan konten; (5) pengembangan standar kompetensi

¹¹ Sebagaimana dimaksud dalam UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

¹² Juga dimungkinkan kustomisasi

kerja bidang keahlian komunikasi dan informatika; (6) fasilitasi sertifikasi kompetensi profesi bekerjasama dengan (K/L) terkait; serta (7) pelatihan dan perkuatan kapasitas SDM aparatur pemerintah/regulator dalam penyusunan kebijakan/regulasi.

8. **Mendorong pemanfaatan TIK untuk bisnis (e-bisnis)** dengan strategi (1) fasilitasi penyediaan akses permodalan untuk UKM TIK bekerjasama dengan (K/L) terkait; (2) fasilitasi penyediaan komputer dan akses internet dengan tarif terjangkau untuk UKM melalui *Community Access Point (CAP)*, *Mobile CAP* dan *Warmasif*; (3) penyediaan bimbingan teknis TIK untuk UKM; (4) penyusunan peraturan perundang-undangan termasuk penyelesaian seluruh PP UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, pembangunan infrastruktur yang aman (*secured*), dan perkuatan kelembagaan (*Indonesian Security Incident Response Team on Internet Infrastructure/ID SIRTII*, Badan Pengawas Sertifikasi Elektronik, Pengelola Nama Domain, *Indonesia Computer Emergency Response Team/ID CERT*) untuk mendorong implementasi transaksi elektronik yang aman; serta (5) bekerjasama dengan (K/L) terkait untuk mendorong implementasi *e-procurement* di seluruh instansi pemerintah.
9. **Peningkatan koordinasi dengan para pemangku kepentingan** dengan strategi (1) sinkronisasi peraturan termasuk peraturan daerah yang terkait dengan pengembangan dan pemanfaatan TIK; (2) penyusunan *road map* Pengembangan TIK Nasional; (3) penyusunan dan pembahasan rancangan kebijakan/peraturan dengan melibatkan partisipasi pemangku kepentingan melalui konsultasi publik; (4) fasilitasi forum komunikasi yang secara berkala membahas kemajuan pelaksanaan kebijakan/peraturan TIK lintas sektor; (5) koordinasi dengan (K/L) terkait dan penyelenggara di luar sub bidang komunikasi dan informatika dalam pemanfaatan infrastruktur, seperti pemanfaatan tiang listrik, jalur (*right of way*) kereta api dan jalan tol, pemanfaatan jaringan pendidikan nasional (*Jardiknas*); serta (f) koordinasi dengan (K/L) terkait untuk mendorong pemanfaatan TIK di sektor lain seperti pelayanan informasi dan perizinan investasi secara elektronik (*online*).

5.3.2.4 Energi dan Ketenagalistrikan

Kebijakan pembangunan prasarana energi dan ketenagalistrikan terkait dengan fokus **Dukungan peningkatan daya saing sektor riil** dalam lima tahun ke depan diarahkan pada hal hal berikut

1. Peningkatan kapasitas sarana dan prasarana energi dan ketenagalistrikan terutama untuk mendukung pembangunan ekonomi. Kebijakan ini diperlukan untuk menyediakan dukungan terhadap energi dan ketenagalistrikan yang mendukung kegiatan pembangunan ekonomi yang berkualitas. Strategi yang dilakukan antara lain:

- a. peningkatan kapasitas pembangkit listrik, dengan melakukan kaji ulang terhadap proyek percepatan pembangunan pembangkit 10.000 MW, fasilitasi proyek pembangunan pembangkit 10.000 MW tahap II khususnya untuk pembangkit yang memanfaatkan EBT, fasilitasi pembangunan pembangkit *Independent Power Producer* (IPP) termasuk penyelesaian permasalahan IPP eksisting, alokasi energi primer (batubara dan gas bumi) untuk pembangkit listrik (*domestic market obligation/DMO*), pengembangan skema baru untuk pengadaan tanah bagi sarana dan prasarana energi dan ketenagalistrikan.
 - b. membangun tambahan jaringan transmisi dan distribusi gas bumi dan ketenagalistrikan;
 - c. meningkatkan jumlah gardu transmisi ketenagalistrikan;
 - d. melanjutkan program pengembangan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN), melalui (i) fasilitasi kaji ulang pembangunan PLTN; dan fasilitasi sosialisasi tentang PLTN;
 - e. meningkatkan pemanfaatan dan pengembangan potensi panas bumi skala besar dan kecil termasuk penyempurnaan regulasi terkait panas bumi dengan: fasilitasi updating database sumber panas bumi, fasilitasi pemanfaatan gas bumi skala kecil, pengalokasi APBN dan dukungan pendanaan murah yang tepat untuk mengurangi risiko pengembangan panas bumi, dan fasilitasi untuk mengakomodasi pengembangan panas bumi dalam penggunaan lahan kehutanan.
 - f. fasilitasi pembangunan sarana dan prasarana minyak dan gas bumi serta energi alternatif seperti *coal bed methane* (CBM), *dimethyl eter* (DME) dan lain-lain;
 - g. pemanfaatan potensi pendanaan domestik baik lembaga keuangan perbankan maupun lembaga keuangan non perbankan, termasuk pengembangan skema pendanaannya.
2. Penyesuaian tarif secara bertahap dan sistematis diarahkan untuk mencapai nilai keekonomiannya yang terjangkau, dan berkeadilan, dengan strategi
 - a. fasilitasi kebijakan dan regulasi berkaitan dengan penyesuaian tarif (BBM dan listrik) yang wajar sekaligus mendorong pemakaian energi yang lebih hemat dan mendorong sistem bisnis yang lebih sehat.
 - b. pelaksanaan tarif regional dengan mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan kondisi geografis setempat serta disesuaikan dengan kualitas pelayanan yang diterima;
 - c. fasilitasi penetapan tarif regional bersama pemerintah daerah.
 3. Pengurangan subsidi secara bertahap dan diarahkan langsung kepada penerima kaum dhuafa serta dimanfaatkan untuk pengembangan EBT. Strategi yang dilakukan adalah dengan : (i) fasilitasi kebijakan subsidi; (ii) pemberian subsidi

listrik kepada pelanggan golongan rumah tangga; (iii) penurunan jumlah subsidi BBM.

4. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi sarana dan prasarana energi, terutama upaya peningkatan diversifikasi energi, peningkatan efisiensi dan konservasi energi, pengurangan *losses*, peremajaan sarana dan prasarana yang kurang efisien, serta penerapan *good governance* pengelolaan korporat. Strategi yang dilakukan adalah:
 - a. meningkatkan program efisiensi dan konservasi energi baik pada sisi hilir maupun hulu, melalui : (i) fasilitasi pembentukan manajer energi; (ii) fasilitasi audit energi; (iii) sosialisasi program efisiensi dan konservasi energi; (iv) *repowering* dan rehabilitasi serta re-konfigurasi sarana dan prasarana ketenagalistrikan; (v) pengembangan pendanaan dan mendorong peran perbankan bagi pelaksanaan efisiensi dan konservasi energi untuk industri dan bangunan; (vi) penyusunan standarisasi peralatan dan pemberian label hemat energi.
 - b. restrukturisasi dan penerapan *good governance* pengelolaan BUMN bidang energi dan ketenagalistrikan;
 - c. penggunaan teknologi yang lebih mutakhir dan efisien sekaligus ramah lingkungan untuk sarana dan prasarana energi dan ketenagalistrikan;
 - d. penelitian dan pengembangan teknologi energi dan ketenagalistrikan yang efisien dan ramah lingkungan; serta
 - e. menyusun dan menyempurnakan regulasi dan kebijakan guna meningkatkan jaminan dan kepastian hukum pengembangan konservasi dan efisiensi energi serta pemanfaatan energi baru terbarukan.
5. Menjaga dampak lingkungan dalam pembangunan energi dan ketenagalistrikan. Strategi yang dilakukan adalah:
 - a. penggunaan energi baru terbarukan dan membuat inovasi dalam pemanfaatan energi yang ramah lingkungan;
 - b. mendorong pembangunan pembangkit listrik selain pembangkit berbahan bakar minyak seperti pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) dan upaya penggunaan teknologi ramah lingkungan untuk pembangkit listrik (seperti *clean coal teknologi*, pemakaian FGD, dan *carbon capture storage/CCS*); serta
 - c. penetapan regulasi dan fasilitasi kebijakan yang memperkecil dampak terhadap lingkungan serta mengakomodasi program terkait mitigasi dalam konteks perubahan iklim.

5.3.2.5 Penanggulangan Semburan Lumpur Sidoarjo

Kebijakan penanggulangan semburan lumpur Sidoarjo terkait dengan dukungan terhadap peningkatan daya saing sektor riil dalam lima tahun ke depan diarahkan pada:

1. peningkatan kualitas penyusunan rencana penanganan dan relokasi infrastruktur;
2. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur luapan lumpur Sidoarjo; dan
3. pembangunan relokasi infrastruktur.

5.3.3 Meningkatkan Kerjasama Pemerintah Dan Swasta

Penyediaan infrastruktur yang efektif, efisien, dan berkelanjutan merupakan salah satu faktor pendorong pertumbuhan dan pemerataan perekonomian jika dilaksanakan melalui kompetisi secara terbuka, adil, dan akuntabel. Untuk itu, pemerintah akan mengurangi perannya sebagai penyedia keseluruhan layanan infrastruktur menjadi fasilitator atau *enabler* sarana dan prasarana yang sudah dapat dilakukan melalui peran serta masyarakat (termasuk badan usaha swasta). Perubahan peran tersebut diwujudkan melalui perubahan peraturan perundang-undangan, baik sektor maupun lintas sektor dengan membuka peluang penyediaan infrastruktur melalui skema KPS.

Untuk mendukung tercapainya sasaran pembangunan sarana dan prasarana tahun 2010—2014, diperkirakan total investasi yang dibutuhkan adalah sebesar Rp. 1.429,3 Trilyun, yang didalamnya kemampuan pemerintah pusat dalam penyediaan pendanaannya hanya sekitar 35,75 persen dari total kebutuhan. Untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan, dilakukan pengembangan KPS, privatisasi, CSR, serta partisipasi pemerintah daerah dan masyarakat. Hal ini harus sejalan dengan visi, misi, dan program aksi presiden terpilih untuk mempercepat pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan melalui *dual track strategy*, yaitu membangun sarana dan prasarana yang dapat memperlancar arus lalu-lintas barang dan informasi, serta mendorong program industrialisasi berupa pengembangan pusat kegiatan (kawasan) yang dapat menarik industri lanjutan untuk berinvestasi di Indonesia.

Sehubungan dengan hal itu, arah kebijakan dalam penyediaan infrastruktur melalui skema KPS adalah: (a) melanjutkan reformasi strategis kelembagaan dan peraturan perundang-undangan pada sektor dan lintas sektor yang mendorong pelaksanaan KPS, (b) mempersiapkan proyek KPS secara matang sehingga dapat menekan biaya transaksi yang tidak perlu, dan (c) menyediakan fasilitas-fasilitas untuk mendukung investasi dalam pembangunan dan pengoperasian proyek KPS, termasuk menyediakan dana pendukung di dalam APBN.

Strategi yang akan ditempuh adalah sebagai (a) membentuk jejaring dan meningkatkan kapasitas untuk mendorong perencanaan dan persiapan proyek KPS, melakukan promosi KPS, peningkatan kapasitas dalam pengembangan, dan memantau pelaksanaan KPS; (b) membentuk fasilitas-fasilitas yang mendorong pelaksanaan proyek KPS, seperti: fasilitasi dalam penyediaan tanah dan pendanaan seperti *Infrastructure funds* dan *guarantee funds*; (c) mendorong terbentuknya regulator

ekonomi sektoral yang adil dalam mewakili kepentingan pemerintah, badan usaha, dan konsumen; (d) memfasilitasi penyelesaian sengketa pelaksanaan proyek KPS secara efisien dan mengikat (e) mempersiapkan proyek KPS yang akan ditawarkan secara matang melalui proses perencanaan yang transparan dan akuntabel; (f) memberi jaminan adanya sistem seleksi dan kompetisi yang adil, transparan, dan akuntabel; (g) meningkatkan pelayanan sarana dan prasarana daerah melalui peningkatan pengeluaran pemerintah daerah yang didukung oleh kerangka insentif yang lebih baik.

Arah kebijakan secara rinci dalam pengembangan KPS pada setiap sub-bidang sarana dan prasarana adalah sebagai berikut

5.3.3.1 Sumber Daya Air

Kebijakan dalam mendukung KPS diarahkan untuk mendorong peran swasta dan masyarakat dalam penyediaan sarana dan prasarana sumber daya air, terutama saluran pembawa air baku. Kebijakan tersebut perlu didukung dengan upaya untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif, di antaranya melalui penetapan hak guna air, peningkatan jaminan atas resiko oleh pemerintah, dan peningkatan *willingness to pay* bagi penerima manfaat.

Strategi pelaksanaan kebijakan tersebut adalah sebagai berikut: (a) menyusun peraturan perundangan yang menjamin swasta untuk dapat berpartisipasi dalam penyediaan sarana dan prasarana sumber daya air; (b) meningkatkan koordinasi antarkementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan masyarakat; (c) mendorong restrukturisasi dan reformasi kelembagaan penyelenggara pelayanan air baku; (d) mengembangkan inovasi sumber pendanaan termasuk penyediaan dukungan pemerintah; (e) mengembangkan kegiatan yang terpadu antara sumber penyediaan air baku dengan sistem penyediaan air minum pada kawasan komersial (termasuk *water conveyance*).

5.3.3.2 Transportasi

Untuk mendukung kelancaran distribusi barang, jasa, dan informasi baik dalam transportasi perkotaan, antarkota maupun antarpulau, arah kebijakan pembangunan transportasi melalui skema KPS dilakukan dengan: (a) mendorong peran swasta pada sektor transportasi melalui reformasi kelembagaan dan peraturan perundang-undangan yang memungkinkan penyediaan infrastruktur dilakukan secara efektif dan efisien melalui kompetisi yang adil, transparan dan terbuka, (b) mendorong kerjasama dan peningkatan kapasitas pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam merencanakan, mempersiapkan serta melakukan transaksi proyek KPS, (c) melakukan *bundling* dan *unbundling* proyek KPS sektor transportasi dan menyediakan fasilitas-fasilitas pendukung kelayakan proyek untuk lebih menarik untuk swasta dalam KPS.

Strategi untuk pelaksanaan arah kebijakan tersebut adalah: (a) melibatkan berbagai sumber pendanaan dalam pembiayaan pembangunan sarana dan prasarana

transportasi termasuk dana infrastruktur, perbankan, pasar modal, dana pensiun, asuransi, dan obligasi, baik domestik maupun internasional; (b) deregulasi sektor transportasi untuk meningkatkan keterlibatan swasta dan masyarakat, antara lain, melalui penerapan tarif yang bersifat pemulihan biaya dan kepastian penerapan tarif berkala, dengan mempertimbangkan aspek sosio-ekonomi dan kemampuan daya beli masyarakat, dan penerapan manajemen risiko yang tepat; (c) menciptakan peraturan perundang-undangan yang lebih operasional yang merupakan turunan dari UU bidang transportasi; (d) mendorong restrukturisasi dan reformasi kelembagaan meliputi pemberdayaan Simpul KPS (*PPP Nodes*) dan peningkatan kapasitas fungsi regulator ekonomi dan penanggung jawab proyek serta reposisi BUMN sektor transportasi sebagai operator sepenuhnya (bukan sebagai regulator); (e) mengembangkan *bundling* pembangunan sarana dan prasarana transportasi dengan pengembangan pusat kegiatan, kawasan industri, kawasan ekonomi khusus, kawasan perdagangan bebas, atau sektor infrastruktur lainnya (seperti jaringan migas, listrik, telekomunikasi, air bersih); (f) mengembangkan *unbundling* pembangunan infrastruktur transportasi melalui penyediaan dukungan pemerintah, baik langsung maupun tidak langsung, yang bersumber dari APBN/APBD murni dan/atau pinjaman/hibah luar negeri untuk penyediaan prasarana nonkomersial termasuk lahan, sedangkan dana pihak swasta digunakan untuk membiayai sarana dan prasarana komersial; (g) mengembangkan skema subsidi/PSO khususnya untuk tarif pelayanan sarana transportasi kelas ekonomi agar terjangkau masyarakat; (h) meningkatkan kerjasama daerah dalam pembangunan sarana dan prasarana transportasi, baik yang bersifat lokal, regional, maupun nasional; serta (i) meningkatkan kerjasama regional dan bilateral serta multilateral khususnya dalam penyediaan fasilitas pendanaan jangka panjang termasuk hibah dan pinjaman lunak yang disertai transfer pengetahuan dan teknologi yang tepat.

5.3.1.3 Perumahan dan Permukiman

A. Air Minum

Arah kebijakan dalam penyediaan air minum dengan skema KPS adalah mengembangkan inovasi pendanaan yang disesuaikan dengan modalitas proyek. Strategi yang ditempuh untuk meningkatkan peran aktif masyarakat dan dunia usaha/swasta sebagai mitra penyediaan air minum adalah: (a) memperbaharui perangkat peraturan yang mendukung pelaksanaan KPS dalam penyediaan air minum; (b) mengembangkan inovasi sumber pendanaan dalam pembiayaan air minum; (c) memperkuat koordinasi kerjasama antarpemerintah daerah dalam konteks pelayanan regional; serta (d) mengembangkan *bundling* untuk sistem penyediaan air minum, seperti instalasi pengolahan air (IPA), transmisi, dan distribusi khususnya dalam skala kawasan komersial, dan *unbundling* untuk penyediaan air minum yang paling komersial, seperti water meter.

B. Persampahan

Arah kebijakan dalam persampahan yang dikembangkan dengan skema KPS adalah meningkatkan peran aktif masyarakat dan dunia usaha/swasta sebagai mitra pengelolaan. Strategi yang ditempuh untuk meningkatkan peran aktif masyarakat dan dunia usaha/swasta sebagai mitra persampahan adalah: (a) upaya pengurangan timbulan sampah mulai dari sumbernya melalui penerapan prinsip 3 R (*reuse, reduce and recycle*), dan mendorong swasta untuk menggunakan kemasan pembungkus yang ramah lingkungan; (b) pengelolaan persampahan secara profesional, melalui pemasaran bisnis persampahan pada masyarakat dan swasta; (c) perkuatan lembaga pengelolaan sampah untuk peningkatan pelayanan persampahan dalam satu wilayah; (d) pemeberian jaminan kepastian hukum kerjasama pengelolaan sampah antarpemda dalam pengelolaan akhir sampah bersama dan antara pemda dengan swasta; (e) memperkuat koordinasi kerjasama antarpemda dalam konteks pelayanan regional; (f) mengembangkan sistem tarif (*tipping fee*) yang mempertimbangkan pemulihan biaya dan kemampuan APBD dan masyarakat di daerah; serta (g) mengembangkan *bundling* untuk sistem pengelolaan sampah, seperti pengumpulan, pengangkutan, dan pengolahan akhir sampah, khususnya dalam skala kawasan komersial, serta pentahapan (*unbundling*) untuk sistem pengelolaan persampahan yang paling komersial, sehingga menarik bagi masyarakat dan swasta.

5.3.3.4 Komunikasi dan Informatika

Adapun arah kebijakan yang terkait dengan komunikasi dan informasi dengan Fokus Meningkatkan Kerja Sama Pemerintah dan Swasta adalah sebagai berikut:

Peningkatan peran/keterlibatan badan usaha termasuk UKM dan koperasi dalam penyelenggaraan komunikasi dan informatika dilakukan dengan strategi sebagai berikut yang ditempuh adalah: (a) pembukaan peluang usaha bagi badan usaha secara kompetitif, tidak diskriminatif, dan transparan dalam penyediaan sarana dan prasarana dan layanan komunikasi dan informatika termasuk di wilayah nonkomersial; (b) penyederhanaan perizinan, antara lain, melalui penerapan *unified access licensing*; (c) pengembangan skema kerja sama antara pemerintah dan swasta dalam penyelenggaraan komunikasi dan informatika selain skema perizinan (*licensing*) dengan memperhatikan pengelolaan risiko antara pemerintah dan badan usaha berdasarkan prinsip pengalokasian risiko kepada pihak yang paling mampu mengendalikan risiko; serta (d) pemberian insentif/stimulus bagi penyelenggara untuk pembangunan di wilayah nonkomersial.

Peningkatan kualitas penyelenggaraan. Kebijakan ini ditujukan untuk menciptakan iklim investasi dan berusaha yang kondusif sehingga memberikan ruang bagi penyelenggara untuk berkembang sekaligus memastikan tercapainya sasaran pembangunan nasional. Strategi yang diambil adalah: (a) penyusunan perangkat

peraturan yang jelas, konsisten, tidak diskriminatif, dan berpandangan ke depan (*forward looking*) beserta rencana transisi/pentahapan (apabila terdapat perubahan peraturan) untuk menjamin perubahan yang halus; (b) penciptaan kompetisi yang sehat dan setara (*level playing field*) dengan tetap menjaga profitabilitas industri dan memperhatikan penguasaan/kepemilikan terhadap sumber daya (*diversity of ownership*); (c) reformasi penarifan layanan dari berbasis jarak dan waktu menjadi volume dan kualitas; serta (d) pengawasan atas penyelenggaraan komunikasi dan informatika termasuk pengawasan terhadap pemenuhan komitmen pembangunan yang melekat pada izin penyelenggaraan operator, pengawasan terhadap kualitas layanan, serta pengawasan terhadap pemanfaatan dan penggunaan sumber daya terbatas, seperti spektrum frekuensi radio.

5.3.3.5 Energi dan Ketenagalistrikan

Arah kebijakan pembangunan prasarana ketenagalistrikan nasional dalam rangka meningkatkan KPS, adalah meningkatkan diversifikasi dalam pemanfaatan energi non-minyak khususnya untuk pembangkit tenaga listrik, yang dikaitkan dengan penurunan tarif dan perubahan iklim (*climate change*).

Dalam pelaksanaan arah kebijakan tersebut, strategi yang akan diterapkan adalah sebagai berikut: (1) memberi kepastian hukum yang adil kepada badan usaha dalam penyediaan tenaga listrik sesuai UU Ketenagalistrikan yang baru; (2) meningkatkan kualitas standar dan prosedur penyiapan proyek yang dapat diterima semua pihak; (3) memberi kepastian yang adil dalam kesepakatan kedua belah pihak dalam perjanjian kerjasama proyek dan perjanjian jual beli energi atau tenaga listrik dengan memperhatikan pengelolaan resiko yang adil dan tepat serta mengikutsertakan pemerintah daerah; (4) mendorong usaha penyediaan ketenagalistrikan pada pembangkitan, transmisi, distribusi dan penjualan tenaga listrik yang dilakukan baik secara terintegrasi maupun secara terpisah.

TABEL 2.2
RENCANA TINDAK PRIORITAS BIDANG SARANA DAN PRASARANA

BIDANG PEMBANGUNAN : SARANA DAN PRASARANA

PRIORITAS BIDANG : 1. Menjamin ketersediaan infrastruktur dasar untuk mendukung peningkatan kesejahteraan

2. Menjamin kelancaran distribusi barang, jasa, dan informasi untuk meningkatkan daya saing produk nasional

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil Outcomes/ Output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN / LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014			
PRIORITAS BIDANG 1 : Menjamin ketersediaan infrastruktur dasar untuk mendukung peningkatan kesejahteraan								175.544,2
A	PENINGKATAN PELAYANAN INFRASTRUKTUR SESUAI STANDAR PELAYANAN MINIMUM (SPM)	Terjaminnya ketersediaan infrastruktur dasar sesuai dengan tingkat kinerja yang telah ditetapkan	Presentase tingkat pelayanan sarana dan prasarana					175.544,2
I	SUMBER DAYA AIR							6.349,4
1	Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku	Meningkatnya layanan prasarana air baku dengan kapasitas 43,4 m3/det dan terjaganya layanan air baku dengan kapasitas 44,8 m3/det	Kapasitas air baku yang ditingkatkan sebesar 43,4 m3/det Kapasitas prasarana air baku yang direhabilitasi sebesar 12,3 m3/det Kapasitas prasarana air baku yang terjaga sebesar total 44,8 m3/det	7,6 m3/det 2,5 m3/det 5,5 m3/det	43,4 m3/det ^{*)} 12,3 m3/det ^{*)} 44,8 m3/det ^{*)}	Pengelolaan Sumber Daya Air	Kemen. Pekerjaan Umum	5.549,4 700,0 100,0

BIDANG PEMBANGUNAN : SARANA DAN PRASARANA

PRIORITAS BIDANG : 1. Menjamin ketersediaan infrastruktur dasar untuk mendukung peningkatan kesejahteraan

2. Menjamin kelancaran distribusi barang, jasa, dan informasi untuk meningkatkan daya saing produk nasional

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil Outcomes/ Output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN / LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014			
II	TRANSPORTASI							92.886,8
	Prasarana Jalan							53.757,1
1	Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan dan Jembatan Nasional	Terjaganya kualitas jalan dan jembatan sepanjang 171.695 Km	Jumlah jalan yang dipreservasi sepanjang 171.695 Km	31.227,80 Km	Jumlah jalan yang dipreservasi sepanjang 171.695 Km ^{K)}	Penyelenggaraan Jalan	Kemen. Pekerjaan Umum	47.545,9
			Jumlah jembatan yang dipreservasi sepanjang 602.944,40 Meter	118.837,54 Meter	Jumlah jembatan yang dipreservasi sepanjang 602.944,40 Meter ^{K)}			5.426,1
2	Penyiapan standar pedoman, penyusunan desain supervisi dan keselamatan jalan serta pengelolaan peralatan bahan jalan/jembatan	Meningkatnya kualitas standar dan pedoman teknis penyelenggaraan jalan 90% per tahun	Jumlah dokuen NSPK dan SPM yang disusun	90%	Jumlah dokuen NSPK dan SPM yang disusun 90 persen	Penyelenggaraan Jalan	Kemen. Pekerjaan Umum	785,1
	Perhubungan Darat							4.290,7
1	Manajemen & Peningkatan Keselamatan Transportasi Darat	Tersusunnya 100% Road Map to Zero Accident	Rencana Induk Keselamatan Lalu lintas Jalan; Rencana Induk Keselamatan Lalu Lintas SDP	1 Paket	5 Paket ^{K)}	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat	Kemen. Perhubungan	100,4

BIDANG PEMBANGUNAN : SARANA DAN PRASARANA

PRIORITAS BIDANG : 1. Menjamin ketersediaan infrastruktur dasar untuk mendukung peningkatan kesejahteraan

2. Menjamin kelancaran distribusi barang, jasa, dan informasi untuk meningkatkan daya saing produk nasional

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil Outcomes/ Output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN / LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014			
			Terseleenggaranya kegiatan keselamatan transportasi darat (sosialisasi; penyusunan pedoman teknis keselamatan transportasi darat; monitoring & evaluasi keselamatan transportasi darat;)	1 Paket	5 Paket ^{K)}			231,7
2	Pembangunan & Pengelolaan Prasarana dan Fasilitas Lalu Lintas Angkutan Jalan	Tersusunnya 100% Road Map to Zero Accident	Terpasangnya fasilitas keselamatan LLAJ	Marka; guardrail; Rambu Lalu Lintas,RPPJ Tiang F, RPPJ Portal, Traffic Light; warning light; delineator; paku jalan; cermin tikungan; Rubber Cone; Rubber Strip, VMS, LPJU dan fasilitas keselamatan LLAJ lainnya	Marka; guardrail; ^{K)} Rambu Lalu Lintas,RPPJ Tiang F, RPPJ Portal, Traffic Light; warning light; delineator; paku jalan; cermin tikungan; Rubber Cone; Rubber Strip, VMS, LPJU dan fasilitas keselamatan LLAJ lainnya	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat	Kemen. Perhubungan	1.489,6
			Pembangunan Alat Pengujian Kendaraan Bermotor	11 Mekanis	60 buah mekanis & 20 ^{K)} mobile			167,0
			Pengembangan Sistem Uji Sertifikasi / Tipe	1 paket	5 Paket ^{K)}			312,5

BIDANG PEMBANGUNAN : SARANA DAN PRASARANA

PRIORITAS BIDANG : 1. Menjamin ketersediaan infrastruktur dasar untuk mendukung peningkatan kesejahteraan

2. Menjamin kelancaran distribusi barang, jasa, dan informasi untuk meningkatkan daya saing produk nasional

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil Outcomes/ Output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN / LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014			
			Implementasi Teknologi Lalu Lintas Angkutan Jalan	Sistem Informasi Angkutan Jalan 1 Pkt, Prasarana Fasilitas Pengendalian Operasional 1 Pkt, RTTMC 1 Pkt, Stiker Pelayanan Angkutan 1 Pkt; Driving Simulator 1 Pkt; Pengemb Data & Informasi Hubdat 1 Pkt; Pembangunan Sistem Informasi Hubdat 1 Pkt	Sistem Informasi ^{K)} Angkutan Jalan 5 Pkt, Prasarana Fasilitas Pengendalian Operasional 5 Pkt, RTTMC 5 Pkt, Stiker Pelayanan Angkutan 5 Pkt; Driving Simulator 5 Pkt; Pengemb Data & Informasi Hubdat 5 Pkt; Pembangunan Sistem Informasi Hubdat 5 Pkt			201,5
			Penataan Manajemen & Rekamata Lalu Lintas	26 Paket	550 paket ^{K)}			258,6
			Prasarana LLAJ Daerah/Kawasan Perbatasan	-	250 paket ^{K)}			13,0
		Terbangunnya Simpul Transportasi Jalan	Jumlah pembangunan terminal transportasi jalan	15 Lokasi	117 Lokasi ^{K)}			609,6
			Jumlah pembangunan jembatan timbang	-	40 Lokasi ^{K)}			155,0

BIDANG PEMBANGUNAN : SARANA DAN PRASARANA

PRIORITAS BIDANG : 1. Menjamin ketersediaan infrastruktur dasar untuk mendukung peningkatan kesejahteraan

2. Menjamin kelancaran distribusi barang, jasa, dan informasi untuk meningkatkan daya saing produk nasional

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil Outcomes/ Output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN / LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014			
		Peningkatan Prasarana/Sarana Angkutan Jalan	Jumlah Rehabilitasi Simpul LLAJ	1 Paket	5 Paket ^{ki}			200,0
			Jumlah Rehabilitasi Fasilitas Keselamatan LLAJ	-	4 Paket ^{ki}			21,4
			Jumlah Peningkatan Fasilitas Pendukung LLAJ	-	4 Paket ^{ki}			5,0
			Kontingensi Bencana Alam	1 Paket	5 Paket ^{ki}			12,7
			Jumlah Alat Kinerja Angkutan Jalan	-	240 paket ^{ki}			13,7
		Pelayanan Keperintisan Angkutan Jalan	Jumlah Lintas Keperintisan Angkutan Jalan yang terlayani	175 lintas	190 lintas ^{ki}			284,9
			Jumlah Bus Perintis	37 unit	577 unit ^{ki}			200,3
			Jumlah Paket Penunjang Operasional Keperintisan	-	240 paket ^{ki}			13,7

BIDANG PEMBANGUNAN : SARANA DAN PRASARANA

PRIORITAS BIDANG : 1. Menjamin ketersediaan infrastruktur dasar untuk mendukung peningkatan kesejahteraan

2. Menjamin kelancaran distribusi barang, jasa, dan informasi untuk meningkatkan daya saing produk nasional

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil Outcomes/ Output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN / LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014			
	Perkeretaapian							5.074,1
1	Pembangunan dan pengelolaan bidang keselamatan dan teknik sarana	110 unit kereta ekonomi (termasuk KPM3) 72 paket pengadaan peralatan/fasilitas sarana dan keselamatan perkeretaapian	Jumlah lokomotif, KRDE yang dibangun Jumlah paket pengadaan peralatan/fasilitas sarana dan keselamatan perkeretaapian	22 unit 11 paket	110 unit kereta ekonomi ^{K)} 72 paket pengadaan peralatan/fasilitas sarana dan keselamatan perkeretaapian ^{K)}	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Perkeretaapian	Kemen. Perhubungan	321,8 391,6
2	Pembangunan dan pengelolaan prasarana dan fasilitas pendukung kereta api	238,65 km jalur KA 53 Jembatan KA 128 paket peningkatan persinyalan 49 paket peningkatan telekomunikasi 206 unit peningkatan fasilitas pintu perlintasan sebidang	Panjang km jalur KA yang direhabilitasi Jumlah unit jembatan KA yang direhabilitasi Jumlah paket pekerjaan peningkatan persinyalan Jumlah paket pekerjaan peningkatan telekomunikasi Jumlah unit peningkatan fasilitas pintu perlintasan sebidang	13,06 km - 16 Paket - 13 unit	238,65 km jalur KA ^{K)} 53 Jembatan KA ^{K)} 128 paket peningkatan persinyalan ^{K)} 49 paket peningkatan telekomunikasi ^{K)} 206 unit peningkatan fasilitas pintu perlintasan sebidang ^{K)}	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Perkeretaapian	Kemen. Perhubungan	525,7 123,7 2.446,6 450,0 359,0

BIDANG PEMBANGUNAN : SARANA DAN PRASARANA

PRIORITAS BIDANG : 1. Menjamin ketersediaan infrastruktur dasar untuk mendukung peningkatan kesejahteraan

2. Menjamin kelancaran distribusi barang, jasa, dan informasi untuk meningkatkan daya saing produk nasional

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil Outcomes/ Output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN / LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014			
		73 paket Pembangunan/rehabilitasi bangunan operasional	Jumlah paket Pembangunan/rehabilitasi bangunan operasional	19 paket	73 paket ^{K)} Pembangunan/rehabili tasi bangunan operasional			455,8
	Perhubungan Laut							12.863,5
1	Pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan di bidang Kenavigasian	Terbangunnya sarana bantu navigasi pelayaran terdiri 93 menara suar; 185 rambu suar; 153 pelampung suar;	unit (menara suar; rambu suar; pelampung suar)	18; 23; 30	SBNP terdiri 93 ^{K)} menara suar; 185 rambu suar; 153 pelampung suar;	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut	Kemen. Perhubungan	1.127,6
		Terbangunnya dan Meningkatnya SBNP di wilayah Indonesia sebanyak 71 tower mensu, 215 unit lampu suar, 50 unit buoy	unit (tower menara suar; lampu suar; bouy)	-	SBNP sebanyak 71 tower mensu, 215 unit lampu suar, 50 unit buoy			567,8
		Tersedianya 922 unit suku cadang SBNP	unit	170	922 unit suku cadang ^{K)} SBNP			154,0
		Terbangunnya gedung SROP dan sistem telekomunikasi pelayaran sebanyak 188 SROP	unit SROP	42	188 SROP ^{K)}			588,1
		Tersedianya 600 unit perangkat radio	unit	200	600 unit radio ^{K)}			54,0

BIDANG PEMBANGUNAN : SARANA DAN PRASARANA

PRIORITAS BIDANG : 1. Menjamin ketersediaan infrastruktur dasar untuk mendukung peningkatan kesejahteraan

2. Menjamin kelancaran distribusi barang, jasa, dan informasi untuk meningkatkan daya saing produk nasional

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil Outcomes/ Output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN / LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014			
		Terpasangnya 39 paket Vessel Traffic Services di Selat Sunda, Lombok, Selat Malaka, ALKI lainnya	paket	15	39 paket VTS ^{ki)}			1.025,0
		Tersedianya 22 unit Suku Cadang SRDP	unit	5	22 unit ^{ki)}			44,0
		Tersedianya 10 unit CCTV	unit	5	10 unit CCTV ^{ki)}			18,0
		Tersedianya 15 unit AIS	unit	7	15 unit AIS ^{ki)}			11,3
		Terbangunnya 7 dermaga kapal kenavigasian	Dermaga	2	7 dermaga ^{ki)}			55,0
		Tersedianya 15 unit kapal inspeksi navigasi	unit	1	15 unit ^{ki)}			120,0
2	Pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan di Bidang Penjagaan Laut dan Pantai	Tersedianya 93 unit kapal patroli KPLP	unit	22	72 unit ^{ki)}	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut	Kemen. Perhubungan	1.516,0
3	Pengelolaan dan Penyelenggaraan kegiatan di bidang Perkapalan dan Kelautan	Tersedianya 29 unit kapal Marine Surveyor	unit	9	29 unit ^{ki)}	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut	Kemen. Perhubungan	23,9

BIDANG PEMBANGUNAN : SARANA DAN PRASARANA

PRIORITAS BIDANG : 1. Menjamin ketersediaan infrastruktur dasar untuk mendukung peningkatan kesejahteraan

2. Menjamin kelancaran distribusi barang, jasa, dan informasi untuk meningkatkan daya saing produk nasional

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil Outcomes/ Output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN / LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014			
4	Pengelolaan dan Penyelenggaraan kegiatan di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Laut	Tersedianya 32 unit kapal penumpang	Unit	2	32 unit ^{K)}	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut	Kemen. Perhubungan	1.493,8
		Tersedianya 2 unit kapal perintis	unit	-	2 unit ^{K)}			1.300,0
		Tersedianya 76 Trayek subsidi perintis angkutan laut di 17 propinsi	Trayek	60	76 Trayek			2.135,0
5	Pengelolaan dan Penyelenggaraan kegiatan di bidang Pelabuhan dan Pengerukan	Terjaganya alur pelayaran melalui pengerukan 61,7 juta m3 sedimen	volume lumpur/sedimen yang dikeruk (juta m3)	6,3	pengerukan 61.7 juta ^{K)} m3 sedimen	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut	Kemen. Perhubungan	880,0
6	Pengelolaan dan Penyelenggaraan kegiatan di bidang Pelabuhan dan Pengerukan	Meningkatnya jumlah dan kapasitas 150 Pelabuhan perintis	Jumlah pelabuhan yang direhabilitasi/ditingkatkan/dibangun	30 Lokasi	150 lokasi ^{K)}			1.750,0
	Perhubungan Udara							14.659,5
1	Pelayanan Angkutan Udara Perintis	115 rute perintis	Jumlah rute perintis yang terlayani	118	115 rute perintis	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara	Kemen. Perhubungan	892,4
		19.006 drum BBM		3.766	19.006 drum BBM ^{K)}			39,7

BIDANG PEMBANGUNAN : SARANA DAN PRASARANA

PRIORITAS BIDANG : 1. Menjamin ketersediaan infrastruktur dasar untuk mendukung peningkatan kesejahteraan

2. Menjamin kelancaran distribusi barang, jasa, dan informasi untuk meningkatkan daya saing produk nasional

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil Outcomes/ Output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN / LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014			
2	Pengawasan dan Pembinaan Kelaikan Udara dan Pengoperasian Pesawat Udara	2.496 paket	Jumlah audit	399	2.496 paket ^{K)}	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara	Kemen. Perhubungan	36,4
		3.170 paket	Jumlah surveillance	496	3.170 paket ^{K)}			40,0
		1.170 paket	Jumlah inspection	189	1.170 paket ^{K)}			14,7
3	Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan Prasarana Bandar Udara	205 paket Bandara	Jumlah bandar udara yang dikembangkan, direhabilitasi	205	205 paket Bandara	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara	Kemen. Perhubungan	6.976,3
		28 paket bandara	Jumlah Bandar udara yang dikembangkan didaerah perbatasan dan rawan bencana	4	28 paket bandara ^{K)}			1.066,1
		1 paket bandara	Jumlah bandar udara baru yang dibangun	1	1 paket bandara			1.861,7
4	Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan Prasarana Navigasi Penerbangan	412 Paket	Jumlah fasilitas navigasi yang dibangun dan yang direhabilitasi	124	412 Paket ^{K)}	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara	Kemen. Perhubungan	1.677,0
		53 Unit		13	53 Unit ^{K)}			398,5
		304 Set		69	304 Set ^{K)}			156,0
5	Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan Prasarana Keamanan Penerbangan	1.423 Paket	Jumlah fasilitas keamanan yang dibangun dan yang direhabilitasi	473	1.423 Paket ^{K)}	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara	Kemen. Perhubungan	865,3
		522 Unit		165	522 Unit ^{K)}			174,7
		1020 Set		300	1020 Set ^{K)}			12,7

BIDANG PEMBANGUNAN : SARANA DAN PRASARANA

PRIORITAS BIDANG : 1. Menjamin ketersediaan infrastruktur dasar untuk mendukung peningkatan kesejahteraan

2. Menjamin kelancaran distribusi barang, jasa, dan informasi untuk meningkatkan daya saing produk nasional

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil Outcomes/ Output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN / LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014			
		57.000 Kg		11000	57.000 Kg ^{K)}			1,2
		193.000 Liter		48000	193.000 Liter ^{K)}			3,4
6	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Perhubungan Udara	3 unit pesawat udara kalibrasi termasuk console (FIS) kalibrasi	Jumlah pesawat udara kalibrasi termasuk console (FIS) kalibrasi yang dibangun	1	3 unit pesawat udara kalibrasi ^{K)}	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara	Kemen. Perhubungan	443,3
	SAR Nasional							2.241,9
1	Kegiatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana SAR	Optimalnya pengoperasian 7 unit BO-105	paket	1 paket	1 paket	Pengelolaan Pencarian, Pertolongan, dan Penyelamatan	Basarnas	2.241,9
		Tersedianya Helikopter type medium 4 unit	unit		4 unit ^{K)}			
		Tersedianya Rubber Boat 104 unit	unit	19	104 unit ^{K)}			500,0
		Tersedianya Rigid Inflatable Boat 50 unit	unit	10	50 unit ^{K)}			20,8
		Tersedianya Rescue Boat type 36, 27 unit	unit	5	27 unit ^{K)}			100,0
		Tersedianya Rescue Boat type 40m 10 unit	unit		10 unit ^{K)}			514,5
		Tersedianya Hovercraft 12 Unit	unit		12 unit ^{K)}			418,0
		Tersedianya Rescue Truck type 2, 8 unit	unit		8 unit ^{K)}			18,0
		Tersedianya Rescue Car / Rescue Jeep	unit	4	27 unit ^{K)}			4,0
		Tersedianya Rapid Deployment Vehicle 99 unit	unit		99 unit ^{K)}			25,5
								19,8

BIDANG PEMBANGUNAN : SARANA DAN PRASARANA

PRIORITAS BIDANG : 1. Menjamin ketersediaan infrastruktur dasar untuk mendukung peningkatan kesejahteraan

2. Menjamin kelancaran distribusi barang, jasa, dan informasi untuk meningkatkan daya saing produk nasional

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil Outcomes/ Output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN / LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014			
		Tersedianya lahan tanah dan dermaga kapal SAR, 5 paket	paket	1 paket	5 paket ^{ki)}			87,4
2	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan serta Pemasyarakatan SAR	Terselenggaranya Pelatihan, pendidikan dan permasyarakatan SAR 12 Paket	paket	12	60 Paket ^{ki)}			18,5
3	Kegiatan Pengelolaan Operasi dan Latihan SAR	Terselenggaranya Operasi dan Latihan SAR	paket	12	65 Paket ^{ki)}			281,5
4	Kegiatan Pengelolaan Komunikasi SAR	Terselenggaranya Pengelolaan Komunikasi SAR	paket	11	55 Paket ^{ki)}			18,2

BIDANG PEMBANGUNAN : SARANA DAN PRASARANA

PRIORITAS BIDANG : 1. Menjamin ketersediaan infrastruktur dasar untuk mendukung peningkatan kesejahteraan

2. Menjamin kelancaran distribusi barang, jasa, dan informasi untuk meningkatkan daya saing produk nasional

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil Outcomes/ Output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN / LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014			
III	PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN							59.778,9
1	Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan dan Penyelenggaraan dalam Pengembangan Permukiman	5 paket, 205 kab/kota	Jumlah penyusunan NSPK bidang pengembangan permukiman	2 paket, 80 kab/kota	5 paket, 205 kab/kota ^{K)}	Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Kemen. Pekerjaan Umum	83,0
	207 kab/kota	Jumlah Strategi Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan (SPPIK)	50	207 kab/kota ^{K)}	292,0			
	207 kab/kota	Jumlah Rencana Pengembangan Kawasan Permukiman (RPKP)	30	207 kab/kota ^{K)}	290,0			
	207 kawasan	Jumlah rencana tindak penanganan kawasan kumuh perkotaan di kab/kota	95	207 kawasan ^{K)}	272,0			
	60 paket	Jumlah peningkatan kemampuan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pengembangan permukiman	0	60 paket ^{K)}	26,0			

BIDANG PEMBANGUNAN : SARANA DAN PRASARANA

PRIORITAS BIDANG : 1. Menjamin ketersediaan infrastruktur dasar untuk mendukung peningkatan kesejahteraan

2. Menjamin kelancaran distribusi barang, jasa, dan informasi untuk meningkatkan daya saing produk nasional

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil Outcomes/ Output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN / LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014			
		207 kawasan	Jumlah kawasan kumuh di perkotaan yang tertangani	95	207 kawasan ^{ki)}			1.358,0
		26.760 unit	Jumlah satuan unit hunian Rumah Susun yang terbangun dan infrastruktur pendukungnya	3960	26.760 unit ^{ki)}			3.330,0
		240 kawasan	Jumlah kawasan perumahan bagi MBR	104	240 kawasan ^{ki)}			837,0
		15 kawasan	Jumlah kawasan permukiman rawan bencana	3	15 kawasan ^{ki)}			65,0
		205 kawasan	Jumlah kawasan perdesaan potensial / agropolitan yang tertangani	55	205 kawasan ^{ki)}			780,0
		185 kawasan	Jumlah kawasan yang dilayani oleh infrastruktur pendukung kegiatan ekonomi dan sosial	50	185 kawasan ^{ki)}			1.285,0
		8.803 desa	Jumlah peningkatan lingkungan hunian untuk masyarakat yang tinggal di pulau kecil, desa tertinggal dan terpencil	1500	8.803 desa ^{ki)}			2.800,0

BIDANG PEMBANGUNAN : SARANA DAN PRASARANA

PRIORITAS BIDANG : 1. Menjamin ketersediaan infrastruktur dasar untuk mendukung peningkatan kesejahteraan

2. Menjamin kelancaran distribusi barang, jasa, dan informasi untuk meningkatkan daya saing produk nasional

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil Outcomes/ Output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN / LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014			
		102 kawasan	Jumlah kawasan yang mengalami peningkatan kualitas lingkungan di kawasan perbatasan dan pulau kecil terluar	39	102 kawasan ^{ki)}			259,0
2	Pengaturan, Pembinaan, Dan Pengawasan Dalam Penataan Bangunan Dan Lingkungan Termasuk Pengelolaan Gedung Dan Rumah Negara, serta Penyelenggaraan Pembangunan Bangunan Gedung dan Penataan Kawasan/Lingkungan Permukiman	37 NSPK NSPK di 226 kab/kota, RTBL di 193 kab/kota, RISPK di 125 kab/kota dan 155 kawasan, RTH di 213 kab/kota, Rencana Tindak Pengembangan Kawasan Permukiman Tradisional dan Bersejarah	Jumlah NSPK bidang Penataan Bangunan dan Lingkungan Jumlah pendampingan penyusunan NSPK bidang penataan bangunan dan lingkungan oleh Pemda	7	37 NSPK ^{ki)} NSPK di 226 ^{ki)} kab/kota, RTBL di 193 kab/kota, RISPK di 125 kab/kota dan 155 kawasan, RTH di 213 kab/kota, Rencana Tindak Pengembangan Kawasan Permukiman Tradisional dan Bersejarah di 33 kawasan	Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Kemen. Pekerjaan Umum	19,0 496,0
		33 propinsi	Jumlah propinsi yang mendapatkan pembinaan peningkatan kualitas penyelenggaraan bangunan gedung	33	33 propinsi			317,0

BIDANG PEMBANGUNAN : SARANA DAN PRASARANA

PRIORITAS BIDANG : 1. Menjamin ketersediaan infrastruktur dasar untuk mendukung peningkatan kesejahteraan

2. Menjamin kelancaran distribusi barang, jasa, dan informasi untuk meningkatkan daya saing produk nasional

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil Outcomes/ Output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN / LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014			
		65 kab/kota	Jumlah kab/kota yang mendapat pemeliharaan gedung negara yang bersejarah	5	65 kab/kota ^{k)}			238,0
		111 kab/kota	Jumlah kab/kota yang mendapat manfaat pengembangan sarana dan prasarana pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran	7	111 kab/kota ^{k)}			329,0
		128 kab/kota	Jumlah kab/kota yang mendapatkan peningkatan bangunan gedung yang memenuhi persyaratan kelengkapan aksesibilitas pada bangunan gedung	10	128 kab/kota ^{k)}			43,0
		152 kawasan	Jumlah kawasan yang meningkat kualitasnya	32	152 kawasan ^{k)}			1.137,0
		207 kawasan	Jumlah kawasan yang mengalami peningkatan kualitas ruang terbuka hijau pada lingkungan permukiman	39	207 kawasan ^{k)}			562,0
		160 kawasan	Jumlah kawasan yang mengalami peningkatan kualitas lingkungan permukiman tradisional dan bersejarah	65	160 kawasan ^{k)}			400,0

BIDANG PEMBANGUNAN : SARANA DAN PRASARANA

PRIORITAS BIDANG : 1. Menjamin ketersediaan infrastruktur dasar untuk mendukung peningkatan kesejahteraan

2. Menjamin kelancaran distribusi barang, jasa, dan informasi untuk meningkatkan daya saing produk nasional

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil Outcomes/ Output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN / LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014			
		33 Propinsi	Jumlah propinsi yang mendapatkan PIP2B	22	33 Propinsi ^{K)}			160,0
		21.984 kel/des	Jumlah kel/des yang mendapatkan pendampingan pemberdayaan masyarakat PNPMP2KP	9556	21.984 kel/des ^{K)}			5.943,0
3	Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, Pengembangan Sumber Pembiayaan Dan Pola Investasi, serta Pengelolaan Pengembangan Infrastruktur Sanitasi Dan Persampahan	75 buah NSPK	Jumlah NSPK untuk pengelolaan air limbah, drainase, dan persampahan yang tersusun	3 NSPK air limbah; 2 NSPK drainase; 3 NSPK persampahan	25 NSPK air limbah; ^{K)} 20 NSPK drainase; 30 NSPK persampahan	Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Kemen. Pekerjaan Umum	67,7
		426 Bantek, Bintek, dan pendampingan SSK	Jumlah Bantek, Bintek, dan pendampingan (SSK pengelolaan air limbah, drainase, dan persampahan	34 Bantek, Bintek, dan pendampingan (SSK air limbah; 8 Bantek, Bintek, dan pendampingan (SSK drainase; 22 Bantek, Bintek, dan pendampingan (SSK persampahan	226 Bantek, Bintek, dan pendampingan (SSK air limbah; 50 Bantek, Bintek, dan pendampingan (SSK drainase; 150 Bantek, Bintek, dan pendampingan (SSK persampahan			644,7
		65 paket diklat	Jumlah penyelenggaraan pelatihan (Diklat) teknis pengelolaan sanitasi lingkungan dan persampahan	6 paket diklat pengelolaan air limbah; 2 paket diklat pengelolaan drainase; 2 paket diklat pengelolaan persampahan	35 paket diklat ^{K)} pengelolaan air limbah; 15 paket diklat pengelolaan drainase; 15 paket diklat pengelolaan persampahan			129,5

BIDANG PEMBANGUNAN : SARANA DAN PRASARANA

PRIORITAS BIDANG : 1. Menjamin ketersediaan infrastruktur dasar untuk mendukung peningkatan kesejahteraan

2. Menjamin kelancaran distribusi barang, jasa, dan informasi untuk meningkatkan daya saing produk nasional

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil Outcomes/ Output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN / LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014			
		426 kegiatan monev	Jumlah monev kinerja pengembangan air limbah, drainase, dan persampahan	34 kegiatan monev air limbah; 7 kegiatan monev drainase; 21 kegiatan monev persampahan	226 kegiatan monev ^{K)} air limbah; 50 kegiatan monev drainase; 150 kegiatan monev persampahan			54,9
		15 kegiatan fasilitasi pengembangan sumber pembiayaan dan pengembangan pola investasi persampahan	Jumlah fasilitasi pengembangan sumber pembiayaan dan pola investasi bidang persampahan melalui kerjasama pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat	2 kegiatan fasilitasi	15 kegiatan fasilitasi ^{K)}			15,0
		peningkatan pelayanan air limbah di 221 kab/kota	Pembangunan prasarana dan sarana air limbah dengan sistem off-site dan on-site	11 kab/kota sistem off-site; 30 kab/kota sistem on-site	11 kab/kota sistem off-site ^{K)} ; 210 kab/kota sistem on-site			4.458,0

BIDANG PEMBANGUNAN : SARANA DAN PRASARANA

PRIORITAS BIDANG : 1. Menjamin ketersediaan infrastruktur dasar untuk mendukung peningkatan kesejahteraan

2. Menjamin kelancaran distribusi barang, jasa, dan informasi untuk meningkatkan daya saing produk nasional

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil Outcomes/ Output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN / LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014			
		penanganan drainase di 50 kab/kota (4.600 Ha)	Pembangunan drainase perkotaan	26 kab/kota	50 kab/kota ^{K)}			3.204,0
		peningkatan TPA di 210 kab/kota, sarana pengumpul sampah sebanyak 250 unit, persampahan terpadu 3R di 250 lokasi	Peningkatan/pembangunan TPA, prasarana pengumpulan sampah dan persampahan terpadu 3R	55 kab/kota peningkatan TPA dan 50 lokasi persampahan terpadu 3R	210 kab/kota ^{K)} peningkatan TPA, 250 unit pengumpul sampah dan 250 lokasi persampahan terpadu 3R			5.500,0
4	Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, Pengembangan Sumber Pembiayaan dan Pola Investasi, serta Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	peningkatan pelayanan air minum di 4.650 desa, 577 kawasan MBR perkotaan, 820 IKK, 100 kawasan khusus (pemekaran, pulau terluar, perbatasan, terpencil, dan KAPET), dan 53 kawasan pelabuhan perikanan	Jumlah desa, kawasan MBR perkotaan, IKK, dan kawasan khusus (pemekaran, pulau terluar, perbatasan, terpencil, dan KAPET) yang terfasilitasi	1.472 desa, 74 kawasan MBR perkotaan, 144 IKK, 18 kawasan khusus, dan 13 kawasan pelabuhan perikanan	4.650 desa, 577 ^{K)} kawasan MBR perkotaan, 820 IKK, 100 kawasan khusus (pemekaran, pulau terluar, perbatasan, terpencil, dan KAPET), dan 53 kawasan pelabuhan perikanan	Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Peremukiman	Kemen. Pekerjaan Umum	10.810,0
		pembinaan bagi 185 PDAM dan 225 non-PDAM	Jumlah PDAM dan non-PDAM yang memperoleh pembinaan	pembinaan 35 PDAM dan 30 non-PDAM	pembinaan 185 ^{K)} PDAM dan 225 non-PDAM			996,0

BIDANG PEMBANGUNAN : SARANA DAN PRASARANA

PRIORITAS BIDANG : 1. Menjamin ketersediaan infrastruktur dasar untuk mendukung peningkatan kesejahteraan

2. Menjamin kelancaran distribusi barang, jasa, dan informasi untuk meningkatkan daya saing produk nasional

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil Outcomes/ Output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN / LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014			
		Rencana Induk SPAM di 200 kab/kota	Jumlah Rencana Induk SPAM yang telah ditetapkan	30 kab/kota	200 kab/kota ^{K)}			209,0
		diklat bagi penyelenggara air minum di 100 kab/kota dan monev di 299 kab/kota	Jumlah penyelenggaraan pelatihan (Diklat) teknis dan jumlah monev penneembangan air minum	18 kab/kota, 50 kab/kota	100 kab/kota, 299 kab/kota ^{K)}			83,0
		22 NSPK air minum dan NSPK dalam Perda di 100 kab/kota	Jumlah NSPK tersusun dan jumlah kab/kota yang menyelenggarakan pengembangan SPAM sesuai NSPK	4 NSPK	22 NSPK air minum ^{K)} dan NSPK dalam Perda di 100 kab/kota			104,0
		fasilitasi pinjaman bank bagi 107 PDAM, prastudi KPS di 23 PDAM, dan 9 laporan studi alternatif pembiayaan pengembangan SPAM	Jumlah laporan pra studi kelayakan KPS dan studi alternatif pembiayaan	20 PDAM terfasilitasi pinjaman bank, 3 PDAM prastudi KPS	fasilitasi pinjaman ^{K)} bank bagi 107 PDAM, prastudi KPS di 23 PDAM, dan 9 laporan studi alternatif pembiayaan pengembangan SPAM			71,0
		kampanye hemat air di 32 provinsi dan percontohan reuse dan daur ulang air limbah di 8 lokasi	Jumlah aktivitas reuse/daur ulang air, jumlah provinsi yang melakukan kampanye	32 provinsi	32 provinsi dan 8 ^{K)} lokasi			74,0

BIDANG PEMBANGUNAN : SARANA DAN PRASARANA

PRIORITAS BIDANG : 1. Menjamin ketersediaan infrastruktur dasar untuk mendukung peningkatan kesejahteraan

2. Menjamin kelancaran distribusi barang, jasa, dan informasi untuk meningkatkan daya saing produk nasional

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil Outcomes/ Output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN / LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014			
5	Pembangunan rumah susun sederhana sewa	380 twin block	Jumlah rusunawa terbangun	100	380 ^{K)}	Pengembangan Perumahan dan Permukiman	Kemenneg Perumahan Rakyat	4.560,0
6	Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan swadaya	50.000 unit	Jumlah fasilitasi dan stimulasi pembangunan baru perumahan swadaya	7500	50000 ^{K)}	Pengembangan Perumahan dan Permukiman	Kemenneg Perumahan Rakyat	536,3
7	Fasilitasi dan stimulasi peningkatan kualitas perumahan swadaya	50.000 unit	Jumlah fasilitasi dan stimulasi peningkatan kualitas perumahan swadaya	7500	50000 ^{K)}	Pengembangan Perumahan dan Permukiman	Kemenneg Perumahan Rakyat	286,3
8	Fasilitasi pembangunan PSU kawasan perumahan dan permukiman	700.000 unit	Jumlah fasilitasi dan stimulasi prasarana, sarana dan utilitas kawasan perumahan dan permukiman	90374	700000 ^{K)}	Pengembangan Perumahan dan Permukiman	Kemenneg Perumahan Rakyat	4.375,0
9	Fasilitasi pembangunan PSU perumahan swadaya	50.000 unit	Jumlah fasilitasi dan stimulasi prasarana, sarana dan utilitas perumahan swadaya	7500	50000 ^{K)}	Pengembangan Perumahan dan Permukiman	Kemenneg Perumahan Rakyat	236,3
10	Fasilitasi dan Stimulasi Penataan Lingkungan Permukiman Kumuh	655 Ha	Jumlah permukiman kumuh yang terfasilitasi	50	655 ^{K)}	Pengembangan Perumahan dan Permukiman	Kemenneg Perumahan Rakyat	1.043,0

BIDANG PEMBANGUNAN : SARANA DAN PRASARANA

PRIORITAS BIDANG : 1. Menjamin ketersediaan infrastruktur dasar untuk mendukung peningkatan kesejahteraan

2. Menjamin kelancaran distribusi barang, jasa, dan informasi untuk meningkatkan daya saing produk nasional

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil Outcomes/ Output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN / LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014			
11	Fasilitasi pra-sertifikasi dan pendampingan pasca-sertifikasi	30.000 unit	Jumlah unit lahan dan bangunan rumah yang terfasilitasi pra-sertifikasi dan pendampingan pasca sertifikasi	0	30000 ^{ki}	Pengembangan Perumahan dan Permukiman	Kemenneg Perumahan Rakyat	12,0
12	Fasilitasi pembangunan rumah khusus	5.000 unit	Jumlah rumah khusus terbangun	250	5000 ^{ki}	Pengembangan Perumahan dan Permukiman	Kemenneg Perumahan Rakyat	259,7
13	Pengembangan Kebijakan dan Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Perumahan dan Permukiman	20 peraturan perundangan	Jumlah revisi peraturan perundangan	4	20 ^{ki}	Pengembangan Perumahan dan Permukiman	Kemenneg Perumahan Rakyat	802,6
14	Pengembangan Kebijakan dan Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Pembiayaan Perumahan dan Permukiman	10 peraturan perundangan	Jumlah revisi peraturan perundangan	2	10 ^{ki}	Pengembangan Pembiayaan Perumahan dan Permukiman	Kemenneg Perumahan Rakyat	412,0
15	bantuan subsidi perumahan	685.000 unit		200000	658000 ^{ki}	Pengembangan Pembiayaan Perumahan dan Permukiman	Kemenneg Perumahan Rakyat	PM

BIDANG PEMBANGUNAN : SARANA DAN PRASARANA

PRIORITAS BIDANG : 1. Menjamin ketersediaan infrastruktur dasar untuk mendukung peningkatan kesejahteraan

2. Menjamin kelancaran distribusi barang, jasa, dan informasi untuk meningkatkan daya saing produk nasional

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil Outcomes/ Output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN / LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014			
IV	ENERGI DAN KETENAGALISTRIKAN							4.160,1
1.	Pembinaan dan Penyelenggaraan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi	Peningkatan Kapasitas, kehandalan dan efisiensi infrastruktur sistem penyediaan bahan bakar dan bahan baku industri	Penambahan jaringan gas kota (kota/sambungan rumah) Pembangunan kilang mini plant LPG Pembangunan unit pengolahan Biofuel dalam rangka pembentukan DME di desa terpilih (desa) Jumlah laporan kapasitas dalam negeri (cadangan strategis, penyimpanan, pengkutan, dan produksi)	3/16000 1 Kajian 8 5 lap	19/80000 ^{*)} 2 kajian/1 kilang miniplant LPG ^{*)} 40 ^{*)} 25 lap ^{*)}	Pengelolaan dan Penyediaan Minyak dan Gas Bumi	KESDM	1.370,8 382,0 40,0 16,6
			Pemenuhan BBM dalam negeri untuk Indonesia bagian timur Laporan penggunaan BBN dalam pemakaian Bahan Bakar total Jumlah laporan Desa Mandiri Energi berbasis BBN (pengawasan, pembinaan dan pengembangan DME)	73,36% 6 lap 2 lap	73,60% ^{*)} 30 lap ^{*)} 10 lap ^{*)}			15,4 115,5 16,6
			Jumlah laporan penjualan hasil olahan migas Jumlah laporan kelangkaan pendistribusian LPG 3 kg (PSO) ke seluruh Indonesia	3 lap 3 lap	15 lap ^{*)} 9 lap ^{*)}			15,6 11,1

BIDANG PEMBANGUNAN : SARANA DAN PRASARANA

PRIORITAS BIDANG : 1. Menjamin ketersediaan infrastruktur dasar untuk mendukung peningkatan kesejahteraan

2. Menjamin kelancaran distribusi barang, jasa, dan informasi untuk meningkatkan daya saing produk nasional

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil Outcomes/ Output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN / LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014			
			Jumlah laporan penambahan kapasitas Depot	4 lap	20 lap ^{ki}			12,7
			Jumlah laporan Indeks kepuasan konsumen bahan bakar	4 lap	20 lap ^{ki}			35,5
			Jumlah laporan penyelenggaraan Usaha Hilir Migas (Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan Niaga)	8 lap	40 lap ^{ki}			30,1
			Jumlah rekomendasi pemantauan realisasi ekspor minyak dan evaluasi stok minyak mentah	2 lap	10 lap ^{ki}			8,5
			Jumlah pelanggaran regulasi usaha hilir (Sosialisasi dan menyusun peraturan, pameran)	1 pkt	5 pkt ^{ki}			10,6
			Laporan prosentase penghematan BBM Bersubsidi	2 lap	10 lap ^{ki}			15,7

BIDANG PEMBANGUNAN : SARANA DAN PRASARANA

PRIORITAS BIDANG : 1. Menjamin ketersediaan infrastruktur dasar untuk mendukung peningkatan kesejahteraan

2. Menjamin kelancaran distribusi barang, jasa, dan informasi untuk meningkatkan daya saing produk nasional

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil Outcomes/ Output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN / LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014			
			Laporan prosentase pengalihan pemakaian minyak tanah ke LPG	1 lap	5 lap ^{ki}			20,1
2.	Penyediaan dan Pengelolaan Energi Baru Terbarukan dan Pelaksanaan Konservasi Energi	Terwujudnya penyediaan dan pengelolaan energi baru terbarukan dan konservasi energi	Kapasitas terpasang pembangkit listrik dari sumber energi mikro hidro (MW)	1,53	46,17 ^{ki}	Pengelolaan Listrik dan Pemanfaatan Energi dan DAK	KESDM dan DAK	69,0 ditambah DAK
			Kapasitas terpasang pembangkit listrik dari sumber energi surya (MWp)	3,55	102,10 ^{ki}			492,6 ditambah DAK
			Kapasitas terpasang pembangkit listrik dari sumber energi angin (MW)	0,00	21,67 ^{ki}			0,0 dari DAK
			Kapasitas pembangkit dari sumber energi biomassa (MW)	0	0,40 ^{ki}			0,0 dari DAK
			Jumlah desa mandiri energi (desa)	50	250 ^{ki}	Pengelolaan Listrik dan Pemanfaatan Energi	KESDM	300,0
			Jumlah studi kelayakan dan pilot project energi laut (studi & pilot)	1 studi	5 studi dan 10 pilot ^{ki}			30,0
			Jumlah gedung dan industri yang menerima layanan audit energi (objek)	185	1003 ^{ki}			115,4
			Jumlah regulasi bidang (energi baru terbarukan, efisiensi energi)(buah)	7	22 ^{ki}			13,1

BIDANG PEMBANGUNAN : SARANA DAN PRASARANA

PRIORITAS BIDANG : 1. Menjamin ketersediaan infrastruktur dasar untuk mendukung peningkatan kesejahteraan

2. Menjamin kelancaran distribusi barang, jasa, dan informasi untuk meningkatkan daya saing produk nasional

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil Outcomes/ Output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN / LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014			
			Tingkat kepedulian masyarakat terhadap pemanfaatan sumber energi baru terbarukan (indeks)	50	50			125,0
			Jumlah peserta bimbingan teknis energi baru terbarukan (orang)	180	900 ^{ki}			5,0
			Jumlah fasilitas energi baru terbarukan yang sudah dikembangkan secara komersial (unit)	10	50 ^{ki}			5,0
			Jumlah jenis peralatan pemanfaat tenaga listrik yang menerapkan labelisasi hemat energi (buah)	3	11 ^{ki}			1,8
			Jumlah manager energi dan auditor energi yang bersertifikat (orang)	-	350 ^{ki}			2,1
			Jumlah peserta bimbingan teknis konservasi energi	170	850 ^{ki}			5,0
			Tingkat kepedulian masyarakat terhadap pelaksanaan konservasi energi (indeks)	50	70 ^{ki}			3,2
			Jumlah pemanfaatan biomassa untuk rumah tangga (laporan)	1 lap	5 lap ^{ki}			17,0

BIDANG PEMBANGUNAN : SARANA DAN PRASARANA

PRIORITAS BIDANG : 1. Menjamin ketersediaan infrastruktur dasar untuk mendukung peningkatan kesejahteraan

2. Menjamin kelancaran distribusi barang, jasa, dan informasi untuk meningkatkan daya saing produk nasional

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil Outcomes/ Output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN / LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014			
3.	Pengaturan, penetapan dan pelaksanaan pengawasan penyediaan dan pendistribusian BBM	Pengaturan penyediaan dan pendistribusian BBM	Jumlah Badan Usaha yang mendapatkan Nomor Registrasi Usaha (NRU) dari BPH Migas	60 Badan usaha	320 lap ^{K)}	Pengaturan dan Pengawasan Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa	KESDM	61,2
			Jumlah pemanfaatan bersama fasilitas pengangkutan dan penyimpanan BBM	1 Badan Usaha Pengangkutan	11 Badan usaha pengangkutan ^{K)}			71,3
				1 Badan Usaha Penyimpanan	11 badan usaha penyimpanan ^{K)}			0,0
		Penetapan Cadangan BBM	Jumlah Penetapan Wilayah Distribusi Niaga (WDN) jenis BBM tertentu	4 Badan usaha	66 badan usaha ^{K)}			61,1
			Jumlah pengawasan infrastruktur penyediaan BBM Nasional	4 pengawasan	20 pengawasan ^{K)}			51,0
		Pengawasan penyediaan dan pendistribusian BBM	Jumlah MoU BPH Migas dengan Pemda	10 MoU	70 MoU ^{K)}			489,8
4.	Pengaturan, penetapan dan pengawasan pada kegiatan usaha pengangkutan Gas Bumi melalui pipa	Pengaturan pada kegiatan usaha pengangkutan Gas Bumi melalui pipa	Jumlah peraturan Pengaturan Akses (Access Arrangement) pada Ruas Transmisi dan/ atau Wilayah Jaringan Distribusi Milik Badan Usaha	3 Jumlah peraturan	25 jumlah peraturan ^{K)}	Pengaturan dan Pengawasan Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa	KESDM	17,2
			Jumlah Lelang Ruas Transmisi Dan Wilayah Jaringan Distribusi (WJD) Gas Bumi Dalam Rangka Pemberian Hak Khusus	2 Ruas 4 WJD	20 ruas 30 WJD ^{K)}			19,4

BIDANG PEMBANGUNAN : SARANA DAN PRASARANA

PRIORITAS BIDANG : 1. Menjamin ketersediaan infrastruktur dasar untuk mendukung peningkatan kesejahteraan

2. Menjamin kelancaran distribusi barang, jasa, dan informasi untuk meningkatkan daya saing produk nasional

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil Outcomes/ Output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN / LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014			
			Jumlah Kajian Keekonomian Pembentukan Kota Gas	9 Kota/Kabupaten	55 kota/kab ^{ki}			16,8
		Penetapan pada kegiatan usaha pengangkutan Gas Bumi melalui pipa	Jumlah penetapan tarif pengangkutan Gas Bumi melalui pipa yang wajar dan efisien untuk pengguna pipa (Shipper) ruas transmisi	2 ruas transmisi	20 ruas transmisi ^{ki}			12,8
			Jumlah wilayah untuk penetapan harga Gas Bumi untuk Rumah Tangga dan pelanggan kecil	11 Wilayah	65 wilayah ^{ki}			12,1
			Jumlah Pemberian HK Ruas Transmisi dan Wilayah Jaringan Distribusi Gas Bumi	2 Ruas Transmisi 4 WJD	20 ruas transmisi 30 ^{ki} WJD			12,1
			Jumlah Pelanggaran Penerapan Harga Gas Bumi Untuk Rumah Tangga dan Pelanggan Kecil	0 Pelanggaran	0 pelanggaran			10,2
		Pengawasan pada kegiatan usaha pengangkutan Gas Bumi untuk RT dan PK	Jumlah Pelanggaran Akun Pengaturan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa	0 Pelanggaran	0 pelanggaran			6,6

BIDANG PEMBANGUNAN : SARANA DAN PRASARANA

PRIORITAS BIDANG : 1. Menjamin ketersediaan infrastruktur dasar untuk mendukung peningkatan kesejahteraan

2. Menjamin kelancaran distribusi barang, jasa, dan informasi untuk meningkatkan daya saing produk nasional

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil Outcomes/ Output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN / LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014			
			Jumlah Pelanggaran Penerapan Tarif Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa	0 Pelanggaran	0 pelanggaran			7,7
			Jumlah Pelaksanaan Pemanfaatan Bersama Fasilitas Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa Transmisi dan Jaringan Distribusi Gas Bumi melalui pipa	2 Badan Usaha	20 Badan usaha ^{ki}			9,7
V	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA							7.367,1
	Kegiatan Prioritas Nasional							
1	Pelaksanaan Pemberdayaan dan Pemerataan Pembangunan Sarana dan Prasarana Informatika	Layanan akses informasi dan komunikasi di wilayah non komersial	Prosentase desa yang dilayani akses telekomunikasi Prosentase desa yang dilayani akses internet Prosentase ibukota provinsi yang terhubung dengan jaringan serat optik Prosentase ibukota kab/kota yang terhubung secara broadband	100 persen 5 persen 10 persen 25 persen	100 persen 80 persen 100 persen 75 persen	Penyelenggaraan Pos dan Informatika	Kemenkominfo	7.367,1

BIDANG PEMBANGUNAN : SARANA DAN PRASARANA

PRIORITAS BIDANG : 1. Menjamin ketersediaan infrastruktur dasar untuk mendukung peningkatan kesejahteraan

2. Menjamin kelancaran distribusi barang, jasa, dan informasi untuk meningkatkan daya saing produk nasional

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil Outcomes/ Output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN / LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014			
			Prosentase ibukota provinsi yang memiliki regional internet exchange	10 persen	100 persen			
			Prosentase ibukota provinsi yang memiliki internasional internet exchange	10 persen	100 persen			
			Jumlah Desa Informasi yang dilengkapi radio komunitas	15 desa	500 desa			
2	Penyediaan jasa pos universal (PSO)	Layanan pos universal	Prosentase kantor pos cabang luar kota penerima PSO	2363 kpclk	2515 kpclk		PT Pos Indonesia (BA 62)	PM
3	Penyediaan layanan penyiaran Lembaga Penyiaran Publik Nasional	Jangkauan layanan TVRI dan RRI	Prosentase jangkauan layanan TVRI dan RRI	60 persen (TVRI), 85 persen (RRI)	88 persen (TVRI), 88 persen (RRI)		TVRI, RRI (BA 69)	PM
VI	BADAN PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO (BPLS)							5.001,9
1	Perencanaan operasi luapan lumpur	Meningkatnya kualitas penyusunan perencanaan pengaliran luapan lumpur ke Kali Porong	Survey Geologi Pemantauan bawah permukaan	3 laporan 1 laporan	7 laporan ^{K)} 5 laporan ^{K)}	Penanggulangan Bencana Lumpur Sidoarjo	BPLS	4,5 3,1
2	Penanganan luapan lumpur	Terlaksananya pengaliran luapan lumpur ke Kali Porong	Penanganan pengaliran luapan lumpur	beroperasinya 6 unit kapal keruk, 27 juta m ³	beroperasinya 12 unit kapal keruk, 48 juta m ³	Penanggulangan Bencana Lumpur Sidoarjo	BPLS	800,4
3	Mitigasi dan penanganan bencana geologi dan monitoring lingkungan	Meningkatnya kemampuan penyediaan data dan informasi fenomena geologi dan penanganan bencana geologi.	Pemantauan dan penanganan mitigasi	1 laporan	5 laporan ^{K)}	Penanggulangan Bencana Lumpur Sidoarjo	BPLS	8,5

BIDANG PEMBANGUNAN : SARANA DAN PRASARANA

PRIORITAS BIDANG : 1. Menjamin ketersediaan infrastruktur dasar untuk mendukung peningkatan kesejahteraan

2. Menjamin kelancaran distribusi barang, jasa, dan informasi untuk meningkatkan daya saing produk nasional

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil Outcomes/ Output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN / LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014			
4	Perencanaan dan pengelolaan pemulihan sosial	Meningkatnya kualitas penyusunan rencana di bidang sosial masyarakat	Pendidikan dan pelatihan teknis/keterampilan.	10 angkatan (400 orang)	50 angkatan (2.000 ^{KK} orang)	Penanggulangan Bencana Lumpur Sidoarjo	BPLS	14,1
5	Pengelolaan penanganan bantuan sosial	Terselenggaranya bantuan sosial masyarakat warga terdampak akibat semburan dan luapan lumpur Sidoarjo	Bantuan sosial yang berupa bantuan kontrak rumah			Penanggulangan Bencana Lumpur Sidoarjo	BPLS	97,8
			a) warga 3 desa (Besuki, Kedungcangkring, Pejajaran)	1.666 KK/ 6.094 jiwa	6.664 KK/24.376 jiwa ^{KK}			17,9
			b) warga 9 RT (Jatirejo, Siring, Mindi)	900 KK/ 2.970 jiwa	3.600 KK/11.880 jiwa ^{KK}			9,4
			c) warga di luar PAT		10.412 KK/37.510 ^{KK} jiwa			62,4

BIDANG PEMBANGUNAN : SARANA DAN PRASARANA

PRIORITAS BIDANG : 1. Menjamin ketersediaan infrastruktur dasar untuk mendukung peningkatan kesejahteraan

2. Menjamin kelancaran distribusi barang, jasa, dan informasi untuk meningkatkan daya saing produk nasional

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil Outcomes/ Output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN / LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014			
6	Peningkatan dan pengelolaan perlindungan sosial	Terlaksananya perlindungan sosial terhadap warga terdampak akibat semburan dan luapan lumpur Sidoarjo	Pembayaran jual beli tanah dan bangunan di 3 desa	1,800 bidang	5.400 bidang ^{K)}	Penanggulangan Bencana Lumpur Sidoarjo	BPLS	340,9
			Pembayaran jual beli tanah dan bangunan diluar peta area terdampak		535 ha ^{K)}			3.723,3
Prioritas Bidang 2: Menjamin kelancaran distribusi barang, jasa, dan informasi untuk meningkatkan daya saing produk nasional								257.039,7
B	DUKUNGAN INFRASTRUKTUR BAGI PENINGKATAN DAYA SAING SEKTOR RIIL	Percepatan peningkatan pelayanan sarana dan prasarana yang mendukung sektor riil	Presentase peningkatan kapasitas dan kuantitas pelayanan sarana dan prasarana					257.039,7
I	SUMBER DAYA AIR							53.220,1
1	Pengelolaan dan Konservasi Waduk, Embung, Situ serta Bangunan Penampung Air Lainnya	Meningkatnya ketersediaan dan terjaganya kelestarian air dengan kapasitas 12 miliar m ³	Jumlah waduk dan embung/situ yang dibangun sebanyak 12 waduk dan 158 embung/situ	1 waduk selesai dibangun; 5 waduk dalam pelaksanaan pembangunan; 20 embung/situ selesai dibangun	11 waduk selesai ^{K)} dibangun; 1 waduk dalam pelaksanaan pembangunan; 158 embung/situ selesai dibangun	Pengelolaan Sumber Daya Air	Kemen. Pekerjaan Umum	6.481,3
			Jumlah waduk, embung/situ yang direhabilitasi sebanyak 29 waduk dan 298 embung/situ	2 waduk selesai di rehabilitasi, 9 waduk dalam pelaksanaan rehabilitasi dan 37 embung/situ selesai direhabilitasi	29 waduk selesai di rehabilitasi, dan 298 embung/situ selesai direhabilitasi			1.845,3

BIDANG PEMBANGUNAN : SARANA DAN PRASARANA

PRIORITAS BIDANG : 1. Menjamin ketersediaan infrastruktur dasar untuk mendukung peningkatan kesejahteraan

2. Menjamin kelancaran distribusi barang, jasa, dan informasi untuk meningkatkan daya saing produk nasional

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil Outcomes/ Output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN / LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)	
				2010	2014				
			Jumlah waduk/embung/situ yang dioperasikan dan dipelihara sebanyak 182 waduk/embung/situ	182 waduk/embung/situ	166 waduk/embung/situ			1.320,0	
			Jumlah kawasan sumber air yang di konservasi sebanyak 15 kawasan	9 kawasan	15 kawasan ⁸⁾			645,0	
		Terkendalnya bahaya banjir, meningkat dan terjaganya ketersediaan air di Daerah Aliran Sungai Bengawan Solo	Jumlah waduk yang dibangun di DAS Bengawan Solo (7 waduk)	1 Waduk Bendo (Ponorogo)	1 Waduk Bendo (Ponorogo)			900,0	
				1 Wadung Gondang (Sragen)	1 Wadung Gondang (Sragen)			306,0	
				Penyelesaian Waduk Gonggang	1 Waduk Gonggang			20,0	
				1 Waduk Kresek (Madiun)	1 Waduk Kresek (Madiun)			457,0	
				1 Waduk Kedung Bendo (Pacitan)	1 Waduk Kedung Bendo (Pacitan)			553,0	
					1 Waduk Kendang (Blora)			107,0	
					1 Waduk Pidekso	1 Waduk Pidekso			1.350,0
									1.060,0
			Prasarana sumber daya air di DAS Bengawan Solo yang direhabilitasi	Penanganan Sedimen Waduk Wonogiri dan Konservasi DAS Keduang	Tertanganinya Sedimen Waduk Wonogiri dan Konservasi DAS Keduang				

BIDANG PEMBANGUNAN : SARANA DAN PRASARANA

PRIORITAS BIDANG : 1. Menjamin ketersediaan infrastruktur dasar untuk mendukung peningkatan kesejahteraan

2. Menjamin kelancaran distribusi barang, jasa, dan informasi untuk meningkatkan daya saing produk nasional

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil Outcomes/ Output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN / LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014			
				Rehabilitasi 7 (Waduk Prijetan, Cengklik, Tlogo Ngebel, Banjar Anyar, Tlego Sarangan, Kedung Uling, Gonggang)	Terehabilitasi 7 (Waduk Prijetan, Cengklik, Tlogo Ngebel, Banjar Anyar, Tlego Sarangan, Kedung Uling, Gonggang)			106,0
				Rehabilitasi Embung / Waduk Lapangan	Terehabilitasi Embung / Waduk Lapangan			105,0
			terpeliharanya waduk di DAS Bengawan Solo	Operasi WS dan Pemeliharaan Infrastruktur SDA Bengawan Solo	Terlaksananya operasi WS dan Pemeliharaan Infrastruktur SDA Bengawan Solo			180,0
			terlaksananya konservasi di DAS Bengawan Solo		Terkonservasinya 2 Kali (Tirtomoyo & Kali Asin)			130,0
					Terkonservasinya arboretum Sumber Daya Air Bengawan Solo			60,0

BIDANG PEMBANGUNAN : SARANA DAN PRASARANA

PRIORITAS BIDANG : 1. Menjamin ketersediaan infrastruktur dasar untuk mendukung peningkatan kesejahteraan

2. Menjamin kelancaran distribusi barang, jasa, dan informasi untuk meningkatkan daya saing produk nasional

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil Outcomes/ Output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN / LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014			
2	Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	Meningkatnya dan terjaganya kualitas dan cakupan layanan pada 2,55 juta hektar daerah irigasi, 1,21 juta daerah rawa dan pemanfaatan air tanah untuk irigasi seluas 44,89 ribu hektar	Luas layanan jaringan irigasi yang ditingkatkan (129,38 ribu hektar)	115 ribu hektar	129,38 ribu hektar ^{K)}	Pengelolaan Sumber Daya Air	Kemen. Pekerjaan Umum	22.129,0
			Luas layanan jaringan irigasi yang direhabilitasi (1,34 juta hektar)	200 ribu hektar	1,34 juta hektar ^{K)}			13.000,0
			Luas layanan jaringan irigasi yang dioperasikan dan dipelihara (2,315 juta hektar)	2,315 juta hektar	2,315 juta hektar			2.000,0
			Luas layanan jaringan rawa yang ditingkatkan (10 ribu hektar)	10 ribu hektar	10 ribu hektar			60,0
			Luas layanan jaringan rawa yang direhabilitasi (450 ribu hektar)	85 ribu hektar	450 ribu hektar ^{K)}			1.700,0
			Luas layanan jaringan rawa yang dioperasikan dan dipelihara (1,2 juta hektar)	800 ribu hektar	1,2 juta hektar ^{K)}			1.000,0
			Jumlah sumur air tanah yang dibangun (70 sumur air tanah)	70 sumur air tanah	70 sumur air tanah			77,0

BIDANG PEMBANGUNAN : SARANA DAN PRASARANA

PRIORITAS BIDANG : 1. Menjamin ketersediaan infrastruktur dasar untuk mendukung peningkatan kesejahteraan

2. Menjamin kelancaran distribusi barang, jasa, dan informasi untuk meningkatkan daya saing produk nasional

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil Outcomes/ Output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN / LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014			
			Jumlah sumur air tanah yang direhabilitasi (1.875 sumur air tanah) untuk mengairi areal seluas 37.500 hektar	230 sumur air tanah	1.875 sumur air tanah ^{K)}			615,8
			Jumlah sumur air tanah yang dioperasikan dan dipelihara (2.192 sumur air tanah) untuk mengairi areal seluas 43.840 hektar	425 sumur air tanah	2.192 sumur air tanah ^{K)}			219,2
			Luas layanan jaringan tata air tambak yang dibangun / ditingkatkan (seluas 1.000 hektar)	1.000 hektar	1.000 hektar			7,5
			Luas layanan jaringan tata air tambak yang direhabilitasi (seluas 175 ribu hektar)	4.000 hektar	175.000 hektar ^{K)}			525,0
			Berkembangnya daerah irigasi dan drainase di DAS Bengawan Solo		Berkembangnya daerah irigasi dan drainase di DAS Bengawan Solo			380,0

BIDANG PEMBANGUNAN : SARANA DAN PRASARANA

PRIORITAS BIDANG : 1. Menjamin ketersediaan infrastruktur dasar untuk mendukung peningkatan kesejahteraan

2. Menjamin kelancaran distribusi barang, jasa, dan informasi untuk meningkatkan daya saing produk nasional

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil Outcomes/ Output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN / LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014			
3	Pengendalian Banjir, Lahar Gunung Berapi dan Pengamanan Pantai	Terlindunginya kawasan seluas 48,66 ribu hektar dari bahaya banjir dan terlindunginya kawasan pantai sepanjang 80 km dari abrasi pantai serta terkendalinya 16 juta m ³ lahar gunung berapi/sedimen	Panjang sarana/prasarana pengendali banjir yang dibangun (216 km)	168 km	216 km ^{ki)}	Pengelolaan Sumber Daya Air	Kemen. Pekerjaan Umum	15.465,6
			Panjang sarana/prasarana pengendali banjir yang direhabilitasi (386 km)	139 km	386 km ^{ki)}			2.508,6
			Panjang sarana/prasarana pengendali banjir yang dioperasikan dan dipelihara (2.000 km) untuk mengamankan kawasan seluas 35,7 ribu hektar	700 km	2.000 km ^{ki)}			3.745,0
			Jumlah sarana/prasarana pengendali lahar/sedimen yang dibangun (100 buah) untuk mengendalikan lahar/sedimen dengan volume 16 juta m ³	28 buah	28 buah			927,5
								116,5

BIDANG PEMBANGUNAN : SARANA DAN PRASARANA

PRIORITAS BIDANG : 1. Menjamin ketersediaan infrastruktur dasar untuk mendukung peningkatan kesejahteraan

2. Menjamin kelancaran distribusi barang, jasa, dan informasi untuk meningkatkan daya saing produk nasional

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil Outcomes/ Output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN / LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014			
			Jumlah sarana/prasarana pengendali lahar/sedimen yang direhabilitasi (85 unit) untuk mengendalikan lahar/sedimen dengan volume 6 juta m ³	4 buah	85 buah ^{ki}			145,0
			Jumlah sarana/prasarana pengendali lahar/sedimen yang dioperasikan dan dipelihara (150 unit) untuk mengendalikan lahar/sedimen dengan volume 12 juta m ³	10 buah	150 buah ^{ki}			75,0
			Panjang sarana/prasarana pengamanan pantai yang dibangun (30 km)	30 km	30 km			200,0
			Panjang sarana/prasarana pengamanan pantai yang direhabilitasi (50 km)	3 km	50 km ^{ki}			278,5

BIDANG PEMBANGUNAN : SARANA DAN PRASARANA

PRIORITAS BIDANG : 1. Menjamin ketersediaan infrastruktur dasar untuk mendukung peningkatan kesejahteraan

2. Menjamin kelancaran distribusi barang, jasa, dan informasi untuk meningkatkan daya saing produk nasional

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil Outcomes/ Output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN / LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014			
			Panjang sarana/prasarana pengamanan pantai yang dipelihara (50 km)	30 km	50 km ^{ks}			50,0
		Berfungsinya Banjir Kanal Timur dalam mengalirkan debit banjir untuk mengurangi daerah genangan akibat banjir di Jakarta	Diselesaikannya pembangunan kanal timur paket 22 s/d 29	7 paket	7 paket	Pengelolaan Sumber Daya Air	Kemen. Pekerjaan Umum	613,7
			Diselesaikannya kegiatan supervisi konstruksi Banjir Kanal Timur	1 kegiatan	1 kegiatan			5,7
			Terbangunnya bangunan akhir / jetty di muara Banjir Kanal Timur		800 meter			196,1
			Terbangunnya jalan inspeksi		19 km			76,4
			Terbangunnya perkuatan tebing		17 km			59,3
			Diselesaikannya normalisasi Kali Blencong		1 km			79,5
			Terbangunnya inlet Cakung		1 buah			14,2
			Terbangunnya Saluran Gendong		7 km			17,8
			Terbangunnya Utilitas (PGN Jaktim, PLN Jaktim, TPJ)		3 unit			20,2
			Terbangunnya Jembatan penyeberangan orang (BKT 226)		1 buah			5,1

BIDANG PEMBANGUNAN : SARANA DAN PRASARANA

PRIORITAS BIDANG : 1. Menjamin ketersediaan infrastruktur dasar untuk mendukung peningkatan kesejahteraan

2. Menjamin kelancaran distribusi barang, jasa, dan informasi untuk meningkatkan daya saing produk nasional

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil Outcomes/ Output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN / LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014			
			Terbangunnya Jembatan BKT 207		1 buah			5,1
			Terbangunnya drain inlet		2 buah			2,2
			Terbangunnya perkuatan bronjong		18.000 m3			41,8
			Tebangunnya jalan oprit		2 buah			7,3
			Diselesaikanya pekerjaan galian dan timbunan hulu Kali Sunter		100 meter			0,9
			Diselesaikannya Pemasangan Grass Block		23,5 meter			28,2
		Terkendalnya bahaya banjir di Daerah Aliran Sungai Bengawan Solo	terbangunnya prasarana pengendali banjir	pompa banjir di 5 lokasi	pompa banjir di 5 lokasi	Pengelolaan Sumber Daya Air	Kemen. Pekerjaan Umum	40,0
				kawasan retensi di 3 Sungai di Ponorogo	kawasan retensi di 3 Sungai di Ponorogo			50,0
				1 Bendung Gerak/Bojonegoro Barrage	1 Bendung Gerak/Bojonegoro Barrage			260,0
				Jabung Ring Dike	Jabung Ring Dike			460,0
				Remaining Works LSRIP-phase I	Remaining Works LSRIP-phase I			100,0

BIDANG PEMBANGUNAN : SARANA DAN PRASARANA

PRIORITAS BIDANG : 1. Menjamin ketersediaan infrastruktur dasar untuk mendukung peningkatan kesejahteraan

2. Menjamin kelancaran distribusi barang, jasa, dan informasi untuk meningkatkan daya saing produk nasional

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil Outcomes/ Output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN / LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014			
				Bendung Gerak Sembavat	Bendung Gerak Sembavat			650,0
				Tanggul Kota Ngawi	Tanggul Kota Ngawi			61,0
				Pengaturan kawasan rawan banjir Bojonegoro	Pengaturan kawasan rawan banjir Bojonegoro			40,0
				Flood Forecasting Warning System (FFWS) Bengawan Solo	Flood Forecasting Warning System (FFWS) Bengawan Solo			40,0
					Tanggul Kiri Bengawan Solo Rengel-Centini			480,0
			Terehabilitasinya prasarana pengendali banjir	pintu air Demangan	pintu air Demangan	Pengelolaan Sumber Daya Air	Kemen. Pekerjaan Umum	130,0

BIDANG PEMBANGUNAN : SARANA DAN PRASARANA

PRIORITAS BIDANG : 1. Menjamin ketersediaan infrastruktur dasar untuk mendukung peningkatan kesejahteraan

2. Menjamin kelancaran distribusi barang, jasa, dan informasi untuk meningkatkan daya saing produk nasional

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil Outcomes/ Output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN / LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014			
				Normalisasi 3 Sungai (Kali Mungkung, Kali Grompol dan Kali Sawur)	Normalisasi 3 sungai (Kali Mungkung, Kali Grompol dan Kali Sawur)			170,0
					Perbaikan dan Pengaturan Kali Madiun (Kwadungan- Ngawi)			540,0
				Normalisasi Kali Lamong	Normalisasi Kali Lamong			1.100,0
				Perbaikan Sungai Bengawan Solo Hulu (Jurug-Sragen)	Perbaikan Sungai Bengawan Solo Hulu (Jurug-Sragen)			2.005,0
				Rehabilitasi Pasca Banjir Kali Madiun	Rehabilitasi Pasca Banjir Kali Madiun			120,0
II	TRANSPORTASI							142.143,9
	Prasarana Jalan							94.661,7
1	Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan dan Jembatan Nasional	Meningkatnya kapasitas dan kualitas jalan sepanjang 19.407,27 Km jalan nasional dan 26.957,83 meter jembatan	Jumlah jalan yang ditingkatkan kapasitasnya (pelebaran) (Km)	3.660,30	19.370,81 ^{K)}			67.021,5
			Jumlah jalan lingkar/bypass yang dibangun (Km)	0,24	36,64 ^{K)}			534,5
			Jumlah jembatan yang bangun (meter)	3.170,42	16.157,83 ^{K)}			4.000,9
			Jumlah flyover/underpass yang dibangun (meter)	4.345,00	10.800,00 ^{K)}			2.437,0
			Jumlah jalan strategis di lintas Selatan Jawa, perbatasan, terpencil dan terluar yang dibangun (Km)	113,43	1377,95 ^{K)}			7.403,9

BIDANG PEMBANGUNAN : SARANA DAN PRASARANA

PRIORITAS BIDANG : 1. Menjamin ketersediaan infrastruktur dasar untuk mendukung peningkatan kesejahteraan

2. Menjamin kelancaran distribusi barang, jasa, dan informasi untuk meningkatkan daya saing produk nasional

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil Outcomes/ Output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN / LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014			
2	Pembinaan Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan dan Fasilitas Jalan Bebas Hambatan dan Perkotaan	Meningkatnya kapasitas jalan tol sepanjang 120,35 Km	Jumlah jalan tol yang dibangun (Km)	5,05	120,35 ^{K)}	Penyelenggaraan Jalan	Kemen. Pekerjaan Umum	8.815,0
3	Penyusunan kebijakan, dan anggaran serta evaluasi pelaksanaan program	Meningkatnya kualitas kebijakan, dan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan jalan 100% per tahun	Jumlah kebijakan, dan evaluasi penyelenggaraan jalan	100%	100%	Penyelenggaraan Jalan	Kemen. Pekerjaan Umum	1.308,5
4	Pembinaan dan monitoring evaluasi pelaksanaan jalan dan jembatan wilayah barat	Terlaksananya pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan jalan dan jembatan di wilayah barat 100% per tahun	Jumlah kegiatan monitoring, evaluasi dan pembnaan pelaksanaan teknis jalan daerah wilayah barat	100%	100%	Penyelenggaraan Jalan	Kemen. Pekerjaan Umum	1.046,8
5	Pembinaan dan monitoring evaluasi pelaksanaan jalan dan jembatan wilayah timur	Terlaksananya pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan jalan dan jembatan di wilayah timur 100% per tahun	Jumlah kegiatan monitoring, evaluasi dan pembnaan pelaksanaan teknis jalan daerah wilayah timur	100%	100%	Penyelenggaraan Jalan	Kemen. Pekerjaan Umum	1.046,8

BIDANG PEMBANGUNAN : SARANA DAN PRASARANA

PRIORITAS BIDANG : 1. Menjamin ketersediaan infrastruktur dasar untuk mendukung peningkatan kesejahteraan

2. Menjamin kelancaran distribusi barang, jasa, dan informasi untuk meningkatkan daya saing produk nasional

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil Outcomes/ Output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN / LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014			
6	Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya Direktorat Jenderal Bina Marga	Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan jalan 100% per tahun	Jumlah dukungan manajemen dan teknis penyelenggaraan jalan	100%	100%	Penyelenggaraan Jalan	Kemen. Pekerjaan Umum	523,4
7	Penyelenggaraan jalan tol	Terlaksananya pengaturan, pengusahaan dan pengawasan penyelenggaraan jalan tol 100% per tahun	Jumlah panjang jalan tol yang dibangun oleh swasta	100%	100%	Penyelenggaraan Jalan	Kemen. Pekerjaan Umum	523,4
Perhubungan Darat								7.153,7
3	Pembinaan dan Pengembangan Sistem Transportasi Perkotaan	Tersusunnya 100% rencana dan sistem transportasi dan evaluasi pelaksanaan program	Jumlah Rencana Induk angkutan perkotaan, rencana induk sistem informasi lalu lintas perkotaan, Laporan evaluasi, Terselenggaranya ATCS, Jumlah Fasilitas Keselamatan Transportasi Perkotaan,	1 Paket	15 Paket ^{K)}	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat	Kemen. Perhubungan	282,5
		Terselenggaranya Transportasi Perkotaan	Jumlah Pengembangan Bus Rapid Transit (BRT), Kota Percontohan, Kawasan Percontohan	1 Paket	5 Paket ^{K)}			379,2
		Transportasi Ramah lingkungan	Jumlah Penyelenggaraan Transportasi Ramah Lingkungan	1 Paket	5 Paket ^{K)}			137,6

BIDANG PEMBANGUNAN : SARANA DAN PRASARANA

PRIORITAS BIDANG : 1. Menjamin ketersediaan infrastruktur dasar untuk mendukung peningkatan kesejahteraan

2. Menjamin kelancaran distribusi barang, jasa, dan informasi untuk meningkatkan daya saing produk nasional

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil Outcomes/ Output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN / LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014			
4	Pembangunan Sarana & Prasarana Transportasi SDP dan pengelolaan prasarana lalulintas SDP	Terbangunnya prasarana transportasi Sungai Danau & Penyeberangan	Jumlah Prasarana Dermaga Penyeberangan	56 dermaga	258 dermaga ^{ki)}	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat	Kemen. Perhubungan	2.791,0
			Jumlah Prasarana Dermaga Sungai & Danau	10 dermaga	236 dermaga ^{ki)}			390,3
			Jumlah Break Water Dermaga Penyeberangan	4 paket	20 paket ^{ki)}			351,0
		Terbangunnya Sarana transportasi Sungai Danau & Penyeberangan	Pembangunan Bus Air	4 Unit	18 Unit ^{ki)}			51,6
		Terbangunnya Fasilitas Keselamatan transportasi Sungai Danau & Penyeberangan	Jumlah Fasilitas Keselamatan terbangun	6 paket	175 paket ^{ki)}			36,2
		Peningkatan Dermaga Penyeberangan	Jumlah Dermaga Penyeberangan yang mengalami peningkatan	5 unit	92 unit ^{ki)}			111,5
		Peningkatan Dermaga Sungai Danau	Jumlah Dermaga Sungai Danau yang mengalami peningkatan	14 Paket	58 Paket ^{ki)}			68,4

BIDANG PEMBANGUNAN : SARANA DAN PRASARANA

PRIORITAS BIDANG : 1. Menjamin ketersediaan infrastruktur dasar untuk mendukung peningkatan kesejahteraan

2. Menjamin kelancaran distribusi barang, jasa, dan informasi untuk meningkatkan daya saing produk nasional

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil Outcomes/ Output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN / LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014			
		Peningkatan Rambu Sungai & Danau	Jumlah Rambu Sungai Danau yang mengalami peningkatan	16 lokasi	80 lokasi ^{K)}			78,0
		Peningkatan Alur Pelayaran	Jumlah Alur Pelayaran yang mengalami peningkatan	7 paket	35 paket ^{K)}			200,0
		Pembangunan Sarana Keperintisan	Jumlah Sarana Keperintisan yang mengalami peningkatan	4 Unit	20 unit ^{K)}			1.264,9
		Pelayanan Keperintisan Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan	Jumlah Lintas Keperintisan Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan yang terlayani	85 Lintas	120 Lintas			775,9
		Terselenggaranya kegiatan penunjang penyelenggaraan SDP	Kegiatan penunjang penyelenggaraan SDP	1 Paket	5 paket ^{K)}			235,6
	Perkeretaapian							28.718,4
1	Pembangunan dan pengelolaan prasarana dan fasilitas pendukung kereta api	1.396,19 km jalur KA	Panjang km jalur KA yang ditingkatkan kondisinya/keandalannya	371,48 km	1.396,19 km jalur KA ^{K)}	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Perkeretaapian	Kemen. Perhubungan	3.234,5
		534,32 km jalur KA	Panjang km jalur KA yang diaktifkan kembali (reaktivasi)	15,00 km	534,32 km jalur KA ^{K)}			1.791,1
		295 unit jembatan KA	Jumlah unit jembatan KA yang ditingkatkan	67 unit	295 unit jembatan KA ^{K)}			1.318,0
		954,43 km jalur KA baru/ jalur ganda, termasuk MRT dan Monorail	Panjang km jalur KA baru yang dibangun termasuk jalur ganda	68,67 km	954,43 km jalur KA ^{K)} baru/ jalur ganda, termasuk MRT dan Monorail			14.751,7

BIDANG PEMBANGUNAN : SARANA DAN PRASARANA

PRIORITAS BIDANG : 1. Menjamin ketersediaan infrastruktur dasar untuk mendukung peningkatan kesejahteraan

2. Menjamin kelancaran distribusi barang, jasa, dan informasi untuk meningkatkan daya saing produk nasional

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil Outcomes/ Output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN / LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014			
		2.457 km'sp material rel	Jumlah km'sp pengadaan rel	157 km	2.457 km'sp material rel ^{K)}			2.847,6
		1.364 unit wesel	Jumlah unit pengadaan wesel	164 unit	1.364 unit wesel ^{K)}			1.247,5
		71 paket peningkatan pelistrikan (diantaranya elektrifikasi sepanjang 289 km)	Jumlah paket pekerjaan peningkatan pelistrikan	13 Paket	71 paket peningkatan pelistrikan (diantaranya elektrifikasi sepanjang 289 km) ^{K)}			2.088,4
		148 paket pengadaan peralatan/fasilitas prasarana perkeretaapian	Jumlah paket pengadaan peralatan/fasilitas prasarana perkeretaapian	14 paket	148 paket pengadaan peralatan/fasilitas prasarana perkeretaapian ^{K)}			474,9
2	Pembangunan dan pengelolaan bidang keselamatan dan teknis sarana	186 unit Sarana KA (Lokomotif, KRDI, KRDE, KRL, Tram, Railbus)	Jumlah unit pengadaan lokomotif, KRDI, KRDE, KRL, Tram, Railbus	7 paket	186 unit Sarana KA (Lokomotif, KRDI, KRDE, KRL, Tram, Railbus) ^{K)}	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Perkeretaapian	Kemen. Perhubungan	880,8
		25 unit modifikasi Sarana KA (KRL menjadi KRDE)	Jumlah unit modifikasi sarana KA	5 unit	25 unit modifikasi Sarana KA (KRL menjadi KRDE) ^{K)}			84,0

BIDANG PEMBANGUNAN : SARANA DAN PRASARANA

PRIORITAS BIDANG : 1. Menjamin ketersediaan infrastruktur dasar untuk mendukung peningkatan kesejahteraan

2. Menjamin kelancaran distribusi barang, jasa, dan informasi untuk meningkatkan daya saing produk nasional

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil Outcomes/ Output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN / LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014			
	Perhubungan Laut							11.610,0
1	Pengelolaan dan Penyelenggaraan kegiatan di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Laut	Terselenggaranya <i>National Single Window</i> pada 14 lokasi	lokasi pelabuhan	1 Lokasi (Kantor Pusat)	14 lokasi ^{K)}	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut	Kemen. Perhubungan	151,0
		Meningkatnya armada niaga pelavaran nasional	jumlah kapal niaga		1 paket			1.200,0
		Tersedianya Master Plan peningkatan perdagangan melalui laut	laporan master Plan	-	1 paket			15,0
		Terselenggaranya Cargo Information System	Paket	1	14 paket ^{K)}			54,0
		Terwujudnya Tatanan Pelabuhan, Rencana Induk Pelabuhan Nasional, Rencana Induk Pelabuhan, serta Peraturan Perundangan Pelaksanaan	Jumlah Peraturan Perundangan, peraturan pelaksanaan teknis, dan laporan kajian	2	15 (Peraturan perundangan, Laporan kajian) ^{K)}			148,0

BIDANG PEMBANGUNAN : SARANA DAN PRASARANA

PRIORITAS BIDANG : 1. Menjamin ketersediaan infrastruktur dasar untuk mendukung peningkatan kesejahteraan

2. Menjamin kelancaran distribusi barang, jasa, dan informasi untuk meningkatkan daya saing produk nasional

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil Outcomes/ Output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN / LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014			
2	Pengelolaan dan Penyelenggaraan kegiatan di bidang Pelabuhan dan Pengerukan	Optimalnya fungsi Sarana dan fasilitas 23 pelabuhan strategis Lhoksemawe, Teluk Bayur, Dumai, Pekan Baru, Palembang, Panjang, Batan, Tg.Pinang, Tg.Emas, Tg.Perak, Cigading, Benoa, Kupang, Pontianak, Banjarmasin, Samarinda, Balikpapan, Bitung, Makasar, Sorong, Ambon, Biak dan Jayapura.	Jumlah lokasi Pelabuhan yang dibangun/ditingkatkan/direhab	3 Lokasi	23 pelabuhan ^{K)} strategis Lhoksemawe, Teluk Bayur, Dumai, Pekan Baru, Palembang, Panjang, Batan, Tg.Pinang, Tg.Emas, Tg.Perak, Cigading, Benoa, Kupang, Pontianak, Banjarmasin, Samarinda, Balikpapan, Bitung, Makasar, Sorong, Ambon, Biak dan Jayapura.	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut	Kemen. Perhubungan	4.792,0
		Pengembangan Pelabuhan Tanjung Priok	lokasi	-	1 lokasi			1.500,0
		Pengembangan Pelabuhan Belawan-Medan	lokasi	-	1 lokasi			2.000,0

BIDANG PEMBANGUNAN : SARANA DAN PRASARANA

PRIORITAS BIDANG : 1. Menjamin ketersediaan infrastruktur dasar untuk mendukung peningkatan kesejahteraan

2. Menjamin kelancaran distribusi barang, jasa, dan informasi untuk meningkatkan daya saing produk nasional

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil Outcomes/ Output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN / LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014			
3	Pengelolaan dan Penyelenggaraan kegiatan di bidang Pelabuhan dan Pengerukan	Meningkatnya kapasitas 125 pelabuhan non perintis	Jumlah pelabuhan yang direhabilitasi/ditingkatkan/dibangun	25 Lokasi	125 lokasi ^{K)}	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut	Kemen. Perhubungan	1.750,0
III	ENERGI DAN KETENAGALISTRIKAN							54.970,0
1.	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Migas	Meningkatkan pembinaan, koordinasi dan dukungan teknis bagi Ditjen Migas secara optimal	Penggunaan Gas alam sebagai bahan bakar angkutan umum perkotaan di Palembang Surabaya dan Balikpapan	1 kajian	3 kajian/21 SPBG ^{K)}	Pengelolaan dan Penyediaan Minyak dan Gas Bumi	KESDM	367,2
2.	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen LPE	Pelayanan yang optimal baik administratif maupun teknis untuk mendukung pelaksanaan tupoksi Ditjen LPE	Jumlah aturan pendukung peraturan perundang-undangan bidang listrik dan pemanfaatan energi	3 PP, 3 RPP	6 PP, 3RPP, 21 Peraturan Lainnya ^{K)}	Pengelolaan Listrik dan Pemanfaatan Energi	KESDM	50,0
3.	Penyusunan Kebijakan dan Program Serta Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Ketenagalistrikan	Terpenuhinya kebutuhan tenaga listrik dan meningkatnya ratio elektrifikasi.	Jumlah Kapasitas pembangkit (MW)	22	60 ^{K)}	Pengelolaan Listrik dan Pemanfaatan Energi	KESDM	595,0
			Transmisi (kms)	3.381	19.462 ^{K)}			16.094,7
			Gardu Induk (MVA)	2.159	12.858 ^{K)}			9.631,0
			Panjang jaringan dan gardu distribusi (kms/MVA)/satker Lisdes	18004/1266	95551/7109 ^{K)}			27.483,0

BIDANG PEMBANGUNAN : SARANA DAN PRASARANA

PRIORITAS BIDANG : 1. Menjamin ketersediaan infrastruktur dasar untuk mendukung peningkatan kesejahteraan

2. Menjamin kelancaran distribusi barang, jasa, dan informasi untuk meningkatkan daya saing produk nasional

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil Outcomes/ Output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN / LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014			
			Jumlah laporan kebijakan investasi listrik	6	34 ^{ki)}			30,8
			Jumlah Laporan Perencanaan dan Program Ketenagalistrikan	7	36 ^{ki)}			172,4
4	Pembinaan, Pengaturan, Pengawasan dan Pengembangan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik	Meningkatnya pelayanan usaha penyediaan tenaga listrik, meningkatnya pengembangan usaha penyediaan tenaga listrik dan meningkatnya mutu usaha penyediaan tenaga listrik	Jumlah rekomendasi pembinaan dan pengawasan kepada PKUK dan PIUKU (buah)	10	60 ^{ki)}	Pengelolaan Listrik dan Pemanfaatan Energi	KESDM	4,5
			Rata-rata pelayanan permohonan daerah usaha atau ekspansi daerah usaha (hari)	30	25			2,4
			Jumlah konsep persetujuan harga beli tenaga listrik yang disampaikan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (buah)	24	120 ^{ki)}			2,5
			Rata-rata waktu penyelesaian evaluasi permohonan persetujuan harga beli tenaga listrik (hari)	20	20			5,0
			Jumlah penetapan/penyesuaian harga jual tenaga listrik oleh Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk Kepentingan Umum (IUKU) (buah)	4	20 ^{ki)}			3,8

BIDANG PEMBANGUNAN : SARANA DAN PRASARANA

PRIORITAS BIDANG : 1. Menjamin ketersediaan infrastruktur dasar untuk mendukung peningkatan kesejahteraan

2. Menjamin kelancaran distribusi barang, jasa, dan informasi untuk meningkatkan daya saing produk nasional

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil Outcomes/ Output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN / LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014			
			Rata-rata waktu penetapan besar susut jaringan PT PLN (Persero) setiap triwulan (hari)	15	15			2,7
			Jumlah perhitungan biaya pokok penyediaan tenaga listrik PT PLN (Persero) (buah)	10	50 ^{ki}			2,5
			Jumlah perhitungan subsidi listrik PT PLN (Persero) (buah)	10	50 ^{ki}			3,3
			Jumlah pelaksanaan fasilitasi perselisihan konsumen listrik dengan penyedia listrik (buah)	80	340 ^{ki}			3,0
			Jumlah pelaksanaan sosialisasi peningkatan usaha (kali)	6	28 ^{ki}			6,3
			Prosentase penyempurnaan dan penvederhanaan aturan usaha(%)	20	30			3,0

BIDANG PEMBANGUNAN : SARANA DAN PRASARANA

PRIORITAS BIDANG : 1. Menjamin ketersediaan infrastruktur dasar untuk mendukung peningkatan kesejahteraan

2. Menjamin kelancaran distribusi barang, jasa, dan informasi untuk meningkatkan daya saing produk nasional

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil Outcomes/ Output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN / LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014			
			Prosentase penyelesaian permohonan daerah usaha dan ekspansi nya (%)	100	100			6,0
			Prosentase izin usaha yang diterbitkan (%)	20	25			6,1
			Prosentase pengawasan terhadap pelaksanaan izin usaha yang diterbitkan	20	25			3,8
			Prosentase persetujuan dan penandasahan Rencana Impor Barang Modal (%)	20	25			4,1
			Prosentase pengawasan terhadap pelaksanaan Impor Barang Modal	20	25			4,1
			Tingkat kepuasan konsumen terhadap pelayanan pengaduan (indeks)	100	100			3,8
			Prosentase penyelesaian pengaduan konsumen listrik (%)	100	100			2,5
			Prosentase pencapaian indikator Tingkat Mutu Pelayanan tenaga listrik (%)	25	80			8,3

BIDANG PEMBANGUNAN : SARANA DAN PRASARANA

PRIORITAS BIDANG : 1. Menjamin ketersediaan infrastruktur dasar untuk mendukung peningkatan kesejahteraan

2. Menjamin kelancaran distribusi barang, jasa, dan informasi untuk meningkatkan daya saing produk nasional

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil Outcomes/ Output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN / LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014			
			Prosentase penyelesaian fasilitasi perselisihan (%)	90	100			2,7
			Tingkat pemahaman sosialisasi peningkatan usaha (indeks)	70	90			2,8
5	Pembinaan keselamatan dan lingkungan lingkungan ketenagalistrikan serta usaha jasa penunjang tenaga listrik	Meningkatnya pembinaan keselamatan dan lingkungan lingkungan ketenagalistrikan	Jumlah perumusan SNI	45	225 ^{K)}	Pengelolaan Listrik dan Pemanfaatan Energi	KESDM	17,5
			Jumlah pemberlakuan SNI sebagai standar wajib	10	50 ^{K)}			1,0
			Jumlah sertifikasi peralatan tenaga listrik dan pemanfaatan tenaga listrik	40	250 ^{K)}			3,1
			Jumlah lokasi pengawasan dan sosialisasi SNI	8	40 ^{K)}			1,3
			Jumlah lokasi sidang dalam rangka kerjasama internasional standardisasi	8	40 ^{K)}			1,8
			Jumlah pembangkit tenaga listrik yang bersertifikat	25	145 ^{K)}			5,2
			Jumlah instalasi transmisi dan distribusi yang bersertifikat	75	395 ^{K)}			4,3
			Jumlah instalasi pemanfaatan tenaga listrik yang bersertifikat	300	1500 ^{K)}			5,4
			Jumlah sosialisasi regulasi teknik dan lingkungan ketenagalistrikan	2	16 ^{K)}			6,4
			Instalasi penyediaan tenaga listrik dan instalasi pemanfaatan tenaga listrik yang aman, andal, dan akrab lingkungan	50%	75%			8,3
			Tingkat mutu dan keandalan pembangkit, transmisi, dan distribusi tenaga listrik	70%	80% ^{K)}			4,8
			Jumlah Badan Usaha Penunjang Tenaga Listrik yang tersertifikasi di bidangnya	5	25 ^{K)}			3,5

BIDANG PEMBANGUNAN : SARANA DAN PRASARANA

PRIORITAS BIDANG : 1. Menjamin ketersediaan infrastruktur dasar untuk mendukung peningkatan kesejahteraan

2. Menjamin kelancaran distribusi barang, jasa, dan informasi untuk meningkatkan daya saing produk nasional

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil Outcomes/ Output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN / LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014			
			Jumlah Lembaga Sertifikasi Produk Yang Terakreditasi	2	35 ^{K)}			12,3
			Jumlah IMJ (Ijin Menggunakan Jaringan) Badan Usaha Pemanfaat jaringan tenaga listrik untuk kepentingan telematika	3	78 ^{K)}			20,8
			Tingkat Tertib administrasi dan teknis di bidang sertifikasi laik operasi instalasi tenaga listrik	60%	80%			1,9
			Tingkat tertib administrasi dan teknis di bidang sertifikasi produk peralatan dan pemanfaat tenaga listrik	60%	80%			2,3
			Jumlah Lembaga Inspeksi Teknik yang terakreditasi	2	67 ^{K)}			26,8
			Penggunaan Barang dan Jasa Produksi dalam negeri dalam pembangunan sektor ketenagalistrikan	60%	80%			4,1
			Jumlah standar kompetensi ketenagalistrikan (buah)	350	1750 ^{K)}			12,6
			Jumlah penetapan dan pemberlakuan standar kompetensi (buah)	3	15 ^{K)}			2,5
			Jumlah sertifikat kompetensi (buah)	560	3100 ^{K)}			4,0
			Jumlah sosialisasi tentang standar kompetensi ketenagalistrikan (buah)	3	17 ^{K)}			2,0
			Jumlah rekomendasi Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing	40	250 ^{K)}			2,8
			Jumlah Tenaga Teknik yang tersertifikasi (orang)	2180	12040 ^{K)}			2,5
			Jumlah updating faktor emisi Clean Development Mechanism (CDM) sistem grid koneksi ketenagalistrikan	1 grid koneksi	33 grid koneksi ^{K)}			33,9

BIDANG PEMBANGUNAN : SARANA DAN PRASARANA

PRIORITAS BIDANG : 1. Menjamin ketersediaan infrastruktur dasar untuk mendukung peningkatan kesejahteraan

2. Menjamin kelancaran distribusi barang, jasa, dan informasi untuk meningkatkan daya saing produk nasional

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil Outcomes/ Output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN / LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014			
			Jumlah data analisis medan magnet dan medan listrik di bawah jaringan SUTET 500 KV serta kesehatan masyarakat yang terpajan medan magnet dan medan listrik di bawah jaringan SUTET	400 responden,	2000 responden ^{K)}			4,0
			Jumlah fasilitasi penyelesaian kasus-kasus lingkungan ketenagalistrikan (SUTET 500 kV, Pembangunan dll)	10 kasus	72 kasus ^{K)}			5,0
			Jumlah pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Community Development Sektor Ketenagalistrikan	13 unit usaha	95 unit usaha ^{K)}			5,9
			Jumlah pembinaan dan pengawasan teknis bidang lingkungan sektor ketenagalistrikan baik pada ijin usaha (AMDAL dan atau UKL/UPL) maupun kelaikan teknis bidang lingkungan ketenagalistrikan	13 sektor	95 sektor ^{K)}			4,8
			Jumlah mitigasi teknologi strategi penurunan emisi CO2 di sektor ketenagalistrikan	1 teknologi	25 teknologi ^{K)}			25,0
6.	Penelitian dan Pengembangan Teknologi Ketenagalistrikan dan Energi Baru Terbarukan	Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan teknologi ketenagalistrikan dan energi baru terbarukan.	Jumlah Kegiatan Penelitian dan Pengembangan	22	90 ^{K)}	Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral	KESDM	133,7

BIDANG PEMBANGUNAN : SARANA DAN PRASARANA

PRIORITAS BIDANG : 1. Menjamin ketersediaan infrastruktur dasar untuk mendukung peningkatan kesejahteraan

2. Menjamin kelancaran distribusi barang, jasa, dan informasi untuk meningkatkan daya saing produk nasional

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil Outcomes/ Output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN / LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014			
7.	Pendidikan dan Pelatihan Ketenagalistrikan dan Energi Baru Terbarukan	Terwujudnya sumberdaya manusia sub sektor ketenagalistrikan dan energi baru terbarukan yang memiliki kompetensi, profesional, berdaya saing tinggi, dan bermoral dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan	Jumlah penyelenggaraan diklat dalam setahun	36	203 ^{K)}	Pendidikan dan Pelatihan Energi dan Sumber Daya Mineral	KESDM	42,0
			Jumlah NSPK diklat yang ditetapkan dan diberlakukan	12	67 ^{K)}			13,9
			Jumlah SDM Aparatur yang ditingkatkan kemampuannya	50	250 ^{K)}			16,2
			Jumlah Lembaga Diklat Profesi/LDP yang terakreditasi sebagai penyelenggara Diklat Teknis	3	29 ^{K)}			0,7
			Prosentase tingkat kinerja organisasi	100	100			2,3
			Jumlah karya ilmiah	10	59 ^{K)}			0,9
			Jumlah jenis diklat yang dibutuhkan	3	15 ^{K)}			4,1
			Jumlah dokumen perencanaan	3	12 ^{K)}			2,4
			Jumlah kerjasama diklat yang diimplementasikan	3	15 ^{K)}			8,8
			Jumlah kegiatan promosi diklat	4	28 ^{K)}			1,6
				Jumlah sistem informasi yang diimplementasikan	1 pkt			5 pkt ^{K)}

BIDANG PEMBANGUNAN : SARANA DAN PRASARANA

PRIORITAS BIDANG : 1. Menjamin ketersediaan infrastruktur dasar untuk mendukung peningkatan kesejahteraan

2. Menjamin kelancaran distribusi barang, jasa, dan informasi untuk meningkatkan daya saing produk nasional

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil Outcomes/ Output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN / LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014			
IV	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA							4.587,6
	Kegiatan Prioritas Nasional							
1	Perencanaan dan Rekrutasi Alokasi Spektrum Frekuensi	Kebijakan, regulasi, rencana pemanfaatan dan rekrutasi sumber daya spektrum frekuensi radio	Prosentase jumlah penetapan pita frekuensi radio dan pemanfaatan slot orbit satelit Prosentase utilitas pemanfaatan spektrum frekuensi radio Prosentase rencana pengalokasian spektrum frekuensi radio untuk broadband wireless access Ketersediaan spektrum frekuensi radio di 108 MHz untuk mendukung siaran TV digital	95 persen 40 persen 100% (BWA 2,3 GHz nomadic) 50% kota besar	95 persen 100 persen 100% (BWA 2,3 GHz ^{K3} nomadic) + 100% (BWA 2,3 GHz mobile) + 100% (BWA 3,3 GHz) 100% kota besar + ^{K3} 50% selain kota besar	Pengelolaan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika	Kemenkominfo	120,7
2	Pelaksanaan Layanan Pemanfaatan Sumber Daya Pos dan Informatika	Kebijakan, regulasi, rencana optimalisasi sumber daya spektrum dan non spektrum	Prosentase pengelolaan sumber daya spektrum frekuensi radio dan orbit satelit Prosentase pengelolaan sumber daya pos, penomoran telekomunikasi dan alamat IP Prosentase pengembangan sarana dan prasarana perizinan Prosentase permohonan pelayanan spektrum yang diproses tepat waktu	40 persen 40 persen 5 persen 5 persen	100 persen 100 persen 100 persen 100 persen	Pengelolaan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika	Kemenkominfo	519,7

BIDANG PEMBANGUNAN : SARANA DAN PRASARANA

PRIORITAS BIDANG : 1. Menjamin ketersediaan infrastruktur dasar untuk mendukung peningkatan kesejahteraan

2. Menjamin kelancaran distribusi barang, jasa, dan informasi untuk meningkatkan daya saing produk nasional

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil Outcomes/ Output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN / LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014			
3	Pengembangan Penyelenggaraan Pos	Kebijakan, regulasi, perijinan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas layanan pos	Prosentase penyelesaian penyusunan Peraturan Pelaksana UU No. 38 Tahun 2009 tentang Pos	60 persen	100 persen	Penyelenggaraan Pos dan Informatika	Kemenkominfo	57,3
			Jumlah kebijakan dan regulasi	6 paket	18 paket ^{ki)}			
			Prosentase verifikasi terhadap pelaksanaan PSO	100 persen	100 persen			
			Prosentase pencapaian terhadap kuantitas dan kualitas layanan pos	60 persen	100 persen			
4	Pengembangan Penyelenggaraan Telekomunikasi	Kebijakan, regulasi, perijinan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas layanan telekomunikasi	Jumlah regulasi teknis infrastruktur menuju era konvergensi	10 paket	87 paket ^{ki)}	Penyelenggaraan Pos dan Informatika	Kemenkominfo	85,6
			Prosentase pencapaian terhadap kualitas penyelenggaraan telekomunikasi dan pemanfaatan aplikasi teknologi telekomunikasi, informasi dan komunikasi	60 persen	100 persen			
			Prosentase pembahasan dan perbaikan materi RUU Multimedia (Konvergensi Telematika) sebagai pengganti UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi	20 persen	100 persen			
			Prosentase pencapaian terhadap kepastian hukum berdasarkan prinsip keadilan dan transparansi bagi pelaku industri telekomunikasi	60 persen	100 persen			
			Prosentase penyusunan dan pembahasan ICT Fund dan optimalisasi pemanfaatan PNBP	100 persen	100 persen			
5	Pengembangan Penyelenggaraan Penyiaran	Kebijakan, regulasi, perijinan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas penyelenggaraan penyiaran	Prosentase pencapaian terhadap pembaharuan kebijakan regulasi dan kelembagaan akibat adanya digitalisasi dan perkembangan industri	60 persen	100 persen	Penyelenggaraan Pos dan Informatika	Kemenkominfo	498,9

BIDANG PEMBANGUNAN : SARANA DAN PRASARANA

PRIORITAS BIDANG : 1. Menjamin ketersediaan infrastruktur dasar untuk mendukung peningkatan kesejahteraan

2. Menjamin kelancaran distribusi barang, jasa, dan informasi untuk meningkatkan daya saing produk nasional

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil Outcomes/ Output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN / LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014			
			Prosentase pencapaian terhadap ketepatan penyelesaian layanan perijinan	50 persen	100 persen			
			Prosentase implementasi migrasi sistem penyiaran dari analog ke digital	10 persen	70 persen			
6	Pelaksanaan Pengamanan Jaringan Internet	Keamanan terhadap jaringan internet nasional	Prosentase pencapaian terhadap keamanan trafik nasional, POP penyelenggara jasa internet dan internet exchange, titik akses ke lembaga pemerintahan dan critical infrastructure	50 persen	70 persen	Penyelenggaraan Pos dan Informatika	Kemenkominfo	116,2
			Prosentase pencapaian terhadap kemampuan data center dalam mengelola integritas, kerahasiaan dan kemandirian data hasil pemantauan, pendeteksian dini, log file serta penyelenggara yang mengirimkan rekaman transaksi dan dukungan terhadap penegakan hukum	50 persen	70 persen			
7	Fasilitasi Penerapan dan Pengembangan E-Government	Kebijakan, regulasi, bimbingan teknis, dan evaluasi pengembangan e-government untuk mendorong peningkatan nilai e-government nasional menjadi 3,4, pencapaian tingkat e-literasi menjadi 50%	Prosentase penyusunan dan pembahasan RPP Penyelenggaraan Sistem Elektronik Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah (e-Government) dan Master Plan e-Government Nasional	100 persen	100 persen	Pengembangan Aplikasi Informatika	Kemenkominfo	877,9
			Prosentase peningkatan penerapan dan kualitas aplikasi e-government di pemerintah kab/kota	10 persen	100 persen			
			Jumlah sekolah di 5 kab/kota DIY yang memiliki sistem e-learning (PHLN Utilization of ICT for Education Quality Enhancement)	50 sekolah	500 sekolah ^{K)}			

BIDANG PEMBANGUNAN : SARANA DAN PRASARANA

PRIORITAS BIDANG : 1. Menjamin ketersediaan infrastruktur dasar untuk mendukung peningkatan kesejahteraan

2. Menjamin kelancaran distribusi barang, jasa, dan informasi untuk meningkatkan daya saing produk nasional

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil Outcomes/ Output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN / LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014			
8	Fasilitasi Penerapan dan Pengembangan E-Bisnis	Kebijakan, regulasi, bimbingan teknis, dan evaluasi pengembangan e-bisnis	Prosentase peningkatan penerapan dan kualitas aplikasi e-bisnis di komunitas UKM Jumlah pusat layanan e-bisnis	10 persen 4 paket	100 persen 25 paket ^{ki)}	Pengembangan Aplikasi Informatika	Kemenkominfo	111,1
9	Fasilitasi Penerapan dan Pengembangan Sistem Keamanan Informasi Elektronik	Kebijakan, regulasi, bimbingan teknis, dan evaluasi pengembangan sistem keamanan informasi elektronik	Prosentase pembahasan dan perbaikan materi RUU Ratifikasi Convention of Cyber Crime Prosentase pembahasan dan perbaikan materi RUU Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cyber Crime) Prosentase penyusunan RPP pelaksana UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Prosentase penyelenggara sistem pengamanan elektronik dapat memenuhi kebutuhan masyarakat	50 persen 50 persen 100 persen 10 persen	100 persen 100 persen 100 persen 100 persen	Pengembangan Aplikasi Informatika	Kemenkominfo	120,4

BIDANG PEMBANGUNAN : SARANA DAN PRASARANA

PRIORITAS BIDANG : 1. Menjamin ketersediaan infrastruktur dasar untuk mendukung peningkatan kesejahteraan

2. Menjamin kelancaran distribusi barang, jasa, dan informasi untuk meningkatkan daya saing produk nasional

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil Outcomes/ Output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN / LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014			
10	Pengembangan Sertifikasi Sistem Elektronik Jasa Aplikasi dan Konten	Kebijakan, regulasi, bimbingan teknis, dan evaluasi pengembangan sertifikasi sistem elektronik, jasa aplikasi, dan konten	Prosentase pengembangan, penerapan, pemanfaatan dan penguasaan perangkat lunak open source	10 persen	30 persen	Pengembangan Aplikasi Informatika	Kemenkominfo	120,7
			Prosentase penyelenggara layanan sistem elektronik telah dapat disertifikasi	10 persen	100 persen			
			Sistem informasi layanan pekerja migran	10 paket	24 paket serta ^{ki)} operasional dan pemeliharaan			
Kegiatan Prioritas Bidang								
11	Pengembangan Standarisasi Perangkat Pos dan Informatika	Kebijakan, regulasi, standar, sertifikasi, interoperabilitas perangkat pos, telekomunikasi dan penyiaran	Prosentase pencapaian standar kelayakan teknis perangkat pos, telekomunikasi dan penyiaran	40 persen	100 persen	Pengelolaan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika	Kemenkominfo	65,4
			Prosentase peningkatan interoperabilitas pada layanan perangkat, aplikasi dan konten	40 persen	100 persen			
			Jumlah spesifikasi teknis alat dan perangkat pos dan telekomunikasi	10 paket	50 paket ^{ki)}			
			Jumlah standarisasi perangkat penyiaran	4 paket	20 paket ^{ki)}			
			Jumlah sertifikat alat dan perangkat telekomunikasi serta surat keterangan Uji Laik Operasi (ULO)	3750 buah	4750 buah			
12	Pengembangan Standarisasi Layanan Pos dan Informatika	Kebijakan, regulasi, standar, sertifikasi, interoperabilitas layanan pos, telekomunikasi dan penyiaran	Paket penyusunan kebijakan, regulasi, sertifikasi di bidang layanan pos, telekomunikasi dan penyiaran	10 paket	50 paket ^{ki)}	Pengelolaan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika	Kemenkominfo	65,7

BIDANG PEMBANGUNAN : SARANA DAN PRASARANA

PRIORITAS BIDANG : 1. Menjamin ketersediaan infrastruktur dasar untuk mendukung peningkatan kesejahteraan

2. Menjamin kelancaran distribusi barang, jasa, dan informasi untuk meningkatkan daya saing produk nasional

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil Outcomes/ Output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN / LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014			
13	Pengendalian Pemanfaatan Sumber Daya Pos dan Informatika	Kebijakan, regulasi dan penertiban dalam rangka meningkatkan kepatuhan penggunaan sumber daya spektrum dan non spektrum	Prosentase ketertiban dan kepatuhan pengguna sumber daya pos, telekomunikasi dan penyiaran	90 persen	90 persen	Pengelolaan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika	Kemenkominfo	67,0
			Prosentase ketertiban dan kepatuhan terhadap penggunaan perangkat pos, telekomunikasi dan penyiaran yang sudah disertifikasi	90 persen	90 persen			
			Prosentase peningkatan pemahaman masyarakat terhadap pemanfaatan sumber daya pos, telekomunikasi dan informatika	90 persen	90 persen			
14	Pelaksanaan Layanan Pengujian dan Kalibrasi Perangkat Pos dan Informatika	Layanan pengujian dan kalibrasi perangkat pos, telekomunikasi dan penyiaran	Prosentase pencapaian kualitas pengujian perangkat pos, telekomunikasi dan penyiaran	90 persen	90 persen	Pengelolaan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika	Kemenkominfo	145,2
15	Pelaksanaan Monitoring, Validasi dan Penertiban Pemanfaatan Sumber Daya Pos dan Informatika	Layanan monitor, validasi dan penertiban untuk meningkatkan kepatuhan terhadap penggunaan sumber daya spektrum frekuensi radio, orbit satelit, perangkat pos, telekomunikasi dan penyiaran	Prosentase penggunaan spektrum frekuensi radio yang mematuhi regulasi dan penyelesaian gangguan di bidang spektrum frekuensi radio, orbit satelit, perangkat pos, telekomunikasi dan penyiaran	70 persen	90 persen	Pengelolaan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika	Kemenkominfo	1.216,8
16	Pengembangan Pentarifan dan Interkoneksi	Kebijakan, regulasi, bimbingan teknis dan evaluasi bidang penyelenggaraan tarif dan interkoneksi	Prosentase pencapaian terhadap keterjangkauan tarif layanan telekomunikasi, penerapan interkoneksi berbasis NGN/konvergensi, dan pengembangan teknologi telekomunikasi, informasi dan komunikasi	60 persen	100 persen	Penyelenggaraan Pos dan Informatika	Kemenkominfo	62,2

BIDANG PEMBANGUNAN : SARANA DAN PRASARANA

PRIORITAS BIDANG : 1. Menjamin ketersediaan infrastruktur dasar untuk mendukung peningkatan kesejahteraan

2. Menjamin kelancaran distribusi barang, jasa, dan informasi untuk meningkatkan daya saing produk nasional

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil Outcomes/ Output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN / LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014			
			Prosentase evaluasi dokumen interkoneksi	100 persen	100 persen			
			Prosentase persiapan migrasi jaringan teknologi berbasis protokol internet (IP)	20 persen	100 persen			
17	Pengendalian Penyelenggaraan Pos dan Informatika	Kebijakan, regulasi, dan penertiban untuk meningkatkan kepatuhan penyelenggaraan pos, telekomunikasi dan penyiaran	Prosentase penyelesaian pelanggaran kepatuhan	100 persen	100 persen	Penyelenggaraan Pos dan Informatika	Kemenkominfo	60,4
			Prosentase pencapaian terhadap penyelenggaraan pos, telekomunikasi, penyiaran dan pengembangan dna pemerataan pembangunan untuk peningkatan kuantitas dan kualitas layananan	60 persen	100 persen			
18	Pengembangan Promosi dan Kemitraan Telematika	Promosi TIK untuk mendorong kompetisi dan kesadaran masyarakat akan pentingnya TIK dalam rangka pencapaian tingkat e-literasi sebesar 50%	Jumlah peserta bimbingan teknis sebagai agent of change untuk peningkatan e- literasi di masyarakat	1000 orang	5000 orang ^{k)}	Pengembangan Aplikasi Informatika	Kemenkominfo	104,0
		Pemanfaatan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi melalui pemberdayaan masyarakat	Prosentase masyarakat yang menjadi target wilayah community access point (CAP) memanfaatkan fasilitas CAP	60 persen	100 persen			
			Prosentase komunitas komunikasi dan informatika telah mampu mengembangkan kretivitas, inovasi dan kearifan lokal	10 persen	100 persen			

BIDANG PEMBANGUNAN : SARANA DAN PRASARANA

PRIORITAS BIDANG : 1. Menjamin ketersediaan infrastruktur dasar untuk mendukung peningkatan kesejahteraan

2. Menjamin kelancaran distribusi barang, jasa, dan informasi untuk meningkatkan daya saing produk nasional

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil Outcomes/ Output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN / LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014			
19	Pelaksanaan Pelatihan dan Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Terbangunnya SDM unggul di bidang teknologi informasi dan komunikasi dalam rangka peningkatan e-literasi	Jumlah peserta diklat teknologi informasi dan komunikasi di ICT Training Center Jababeka dan UIN Syarif Hidayatullah (NICT HRD)	3000 orang	27000 orang ^{K)}	Penelitian dan Pengembangan SDM Kemenkominfo	Kemenkominfo	172,5
V	Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS)							2.118,1
1	Perencanaan pembangunan infrastruktur	Meningkatkan kualitas penyusunan rencana penanganan infrastruktur dan relokasi infrastruktur	Disain dan Supervisi Pembangunan Jalan Arteri dan PDAM KMS Disain dan Supervisi Pembangunan Infrastruktur Luapan Lumpur	1 paket 3 paket	7 paket ^{K)} 9 paket ^{K)}	Penanggulangan Bencana Lumpur Sidoarjo	BPLS	27,0 8,0 19,0
2	Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur luapan lumpur	Meningkatnya pengelolaan dan pengawasan pembangunan/pemeliharaan penanganan infrastruktur akibat luapan lumpur Sidoarjo	Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur luapan lumpur a) terbangun tanggul luar 3 desa dan Gempolsari panjang total sekurang-kurangnya 3.500 m b) selesainya perbaikan saluran irigasi dan drainase dengan panjang masing-masing sekurang-kurangnya 1.500 m	3.500 m 1.500 m	3.500 m 1.500 m	Penanggulangan Bencana Lumpur Sidoarjo	BPLS	1.352,2 532,4
			c) perbaikan sistem drainase dan Kali Ketapang sepanjang 22 km dan saluran irigasi d) selesainya normalisasi alur Kali Porong di muara melalui pengerukan endapan sebesar 500.000 m ³	500.000 m ³	22 km ^{K)} 500.000 m ³			

BIDANG PEMBANGUNAN : SARANA DAN PRASARANA

PRIORITAS BIDANG : 1. Menjamin ketersediaan infrastruktur dasar untuk mendukung peningkatan kesejahteraan

2. Menjamin kelancaran distribusi barang, jasa, dan informasi untuk meningkatkan daya saing produk nasional

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil Outcomes/ Output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN / LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014			
			e) selesainya peningkatan/pemeliharaan jalan dengan panjang total jalan lingkungan Mindi 1,5 km	1,5 km	1,5 km			
			Penataan dan pengembangan wilayah berdekatan PAT	4 paket	14 paket			181,6
			Revitalisasi Kali Ketapang					544,3
			a) pembebasan tanah 53,25 ha		53,25 ha			
			b) normalisasi Kali Ketapang 24 km		24 km ^{ko}			
			c) pembuatan jalan inspeksi Kali Ketapang 20 km		20 km ^{ko}			
			d) normalisasi Kali Jatianom, Kali Datar dan Kali Bunyuk total 21 km		21 km			
			Penataan dan pengembangan muara Kali Porong					94,0
			a) pembuatan dermaga beserta fasilitasnya		1 paket			
			b) perbaikan/peningkatan jalan Porong ke muara Kali Porong total 17 km		17 km ^{ko}			
3	Pembangunan relokasi Infrastruktur	Meningkatnya pengelolaan dan pengawasan pembangunan/ pemeliharaan penanganan infrastruktur pengganti akibat luapan lumpur Sidoarjo	Melanjutkan pengadaan tanah	24,76 ha	24,76 ha	Penanggulangan Bencana Lumpur Sidoarjo	BPLS	738,9
			Pembangunan relokasi jalan arteri	9,9 km	9,9 km			174,8
			Pembangunan simpang susun Kesambi		1 paket			199,1
			Pembangunan relokasi pipa PDAM		2 pipa diameter 450 mm @ 7,1 km			150,0
			Pelapisan aspal beton jalan arteri		2 x 7,1 km			75,0
			Pembuatan landscaping di kiri – kanan jalan Relokasi Arteri Porong		2 x 7,1 km			30,0
			Pembangunan relokasi ruas di desa Pamotan		1,5 km			20,0
								90,0

BIDANG PEMBANGUNAN : SARANA DAN PRASARANA

PRIORITAS BIDANG : 1. Menjamin ketersediaan infrastruktur dasar untuk mendukung peningkatan kesejahteraan

2. Menjamin kelancaran distribusi barang, jasa, dan informasi untuk meningkatkan daya saing produk nasional

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil Outcomes/ Output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN / LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014			
C	PENINGKATAN INVESTASI INFRASTRUKTUR MELALUI KERJASAMA PEMERINTAH DAN SWASTA	Tercapainya target pembangunan bidang sarana dan prasarana	presentase investasi swasta dalam bidang sarana dan prasarana					407.110,3
I	TRANSPORTASI							342.425,3
	Prasarana Jalan							191.438,0
1	Penyelenggaraan Jalan Tol	Terbangunnya jalan tol di Pulau Sumatera, Pulau Batam, Pulau Jawa, Pulau Bali, Pulau Kalimantan dan Pulau Sulawesi	kilometer jalan tol	37 km	1.296 km ^{K)}	Penyelenggaraan Jalan	Kemen. Pekerjaan Umum	161.438,0
		Pembangunan jembatan Selat Sunda dan kawasan pendukungnya	kilometer jembatan Selat Sunda dan sebagian kawasan pendukung		5 km			30.000,0
	Perhubungan Darat							1.228,0
1	Pembangunan dan Pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Fasilitas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Terbangunnya terminal kargo dan terminal terpadu di Pulau Sumatera	terbangunnya 1 buah terminal kargo dan 1 buah terminal terpadu		2 buah	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat	Kemen. Perhubungan Pemerintah Kota	1.228,0
		Terbangunnya terminal feri antara pulau Jawa dan pulau Sumatera	terbangunnya 1 buah terminal feri		1 buah	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat	Pemda Kabupaten	

BIDANG PEMBANGUNAN : SARANA DAN PRASARANA

PRIORITAS BIDANG : 1. Menjamin ketersediaan infrastruktur dasar untuk mendukung peningkatan kesejahteraan

2. Menjamin kelancaran distribusi barang, jasa, dan informasi untuk meningkatkan daya saing produk nasional

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil Outcomes/ Output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN / LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014			
	Perkeretaapian							133.935,0
1	Pembangunan dan pengelolaan	Terbangunnya jalur kereta api penumpang dan barang di Pulau Sumatera, Pulau Jawa dan Pulau Kalimantan	Terbangunnya 17 jalur Kereta Api angkutan barang dan 2 angkutan penumpang di Jakarta		1.594 km		Kemen. Perhubungan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota	133.935,0
	Perhubungan Laut							5.455,5
1	Pengelolaan sarana dan fasilitas pelabuhan	Terbangunnya pelabuhan penumpang dan barang di pulau Jawa, pulau Bali dan pulau Kalimantan	terbangunnya 7 pelabuhan penumpang dan barang		7 buah		Kemen. Perhubungan dan Pemerintah Daerah	5.455,5
	Perhubungan Udara							10.368,8
1	Pengelolaan Sarana dan Fasilitas Bandar Udara	Terbangunnya 1 Bandar Udara internasional dan 2 perluasan sarana fasilitas Bandar Udara Nasional	Bandar Udara Internasional Jawa Barat Kertajati, Bandar Udara Juwata Bandar Udara sentani		1 buah 1 buah 1 buah		Kemen. Perhubungan, Pemprov dan Pemkot	10.368,8
II	PERUMAHAN PERMUKIMAN							7.735,0
	Air Bersih							6.195,0
	Meningkatnya pelayanan prasarana	Meningkatnya transmisi dan distribusi air untuk pelayanan sektor air minum perkotaan di pulau Sumatera, pulau Jawa, pulau Bali, pulau Sulawesi	Pelayanan transmisi air minum dan peningkatan distribusi sambungan air minum di kawasan perkotaan.		20.850 liter / detik		Kemen. Pekerjaan Umum dan Pemerintah Daerah	6.195,0

BIDANG PEMBANGUNAN : SARANA DAN PRASARANA

PRIORITAS BIDANG : 1. Menjamin ketersediaan infrastruktur dasar untuk mendukung peningkatan kesejahteraan

2. Menjamin kelancaran distribusi barang, jasa, dan informasi untuk meningkatkan daya saing produk nasional

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil Outcomes/ Output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN / LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014			
	Persampahan							1.200,0
	Pengelolaan persampahan perkotaan secara terpadu	Pembangunan Pengelolaan persampahan terpadu di kota Bandung dan sekitarnya serta Kota Bogor dan Depok	Terbangunnya instalasi pengelolaan persampahan terpadu		2 buah		Kemen. Pekerjaan Umum dan Pemerintah Kota	1.200,0
	Air Baku							340,0
	Pengelolaan prasarana transmisi air baku untuk beberapa kawasan di pulau Jawa	Pembangunan saluran pembawa air baku di beberapa kota	Terbangunnya saluran pembawa air baku		1.436 liter / detik		Dep. Pekerjaam Umum dan Pemerintah Kota	340,0
III	ENERGI DAN KETENAGALISTRIKAN							46.950,0
1	Perbaikan iklim investasi bagi Independent Power Producer (IPP).	Pembangunan Pembangkit Listrik di pulau Jawa, pulau Sumatera, pulau Kalimantan, pulau Sulawesi	terbangunnya pembangkit listrik		3.495 MW		Dep. Energi dan Sumber Daya Mineral	46.950,0
TOTAL PPP								407110,3 *)
TOTAL BIDANG SARANA DAN PRASARANA								432.584,0

Keterangan :

1. Transportasi Perkeretaapian: Untuk kegiatan pembangunan track baru jalur KA hanya menampung sebagian kebutuhan untuk pembangunan MRT dan Monorail, serta double-double track Manggarai - Cikarang

2. Energi dan Ketenagalistrikan: Pagu Ditjen LPE dengan Pengelolaan Listrik dan Pemanfaatan Energi, termasuk tambahan untuk usulan alokasi kegiatan Lisdes EBT sebesar Rp. 10 Triliun dari DAK

*) Alokasi yang akan dibiayai oleh swasta

*) Angka kumulatif 5 tahun (2010-2014)



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2010
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH NASIONAL
(RPJMN)
TAHUN 2010--2014**

**BUKU II
MEMPERKUAT SINERGI ANTARBIDANG PEMBANGUNAN**

**BAB VI
POLITIK**

**Diperbanyak Oleh:
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS)
2010**



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
BAB VI POLITIK	II.6-1
6.1 Subbidang Politik dalam Negeri dan Komunikasi	II.6-1
6.1.1 Kondisi Umum	II.6-1
6.1.2 Permasalahan dan Sasaran Pembangunan	II.6-11
6.1.2.1 Permasalahan	II.6-12
6.1.2.2 Sasaran.....	II.6-19
6.1.3 Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan	II.6-20
6.2 Sub Bidang Politik Luar Negeri.....	II.6-26
6.2.1 Kondisi Umum.....	II.6-27
6.2.2 Permasalahan dan Sasaran Pembangunan.....	II.6-47
6.2.2.1 Permasalahan.....	II.6-47
6.2.2.2 Sasaran Pembangunan.....	II.6-57
6.2.3 Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan.....	II.6-58



BAB VI

POLITIK

Pembangunan demokrasi memiliki arti sangat penting dalam pembangunan nasional secara keseluruhan. Demokrasi secara tersurat dan tersirat sudah menjadi amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Konsolidasi demokrasi yang bertahap dan terencana dengan baik diharapkan dapat mengantarkan bangsa Indonesia ke dalam sistem berdemokrasi yang sesungguhnya, serta dapat menghindarkan arus balik otoritarianisme ke dalam seluruh sistem politik Indonesia.

Konsolidasi demokrasi Indonesia yang akan terus-menerus dilaksanakan secara berkelanjutan ke depan harus dijiwai oleh nilai-nilai dasar yang mulia dari setiap sila Pancasila yang telah menjadi pegangan para bapak pendiri bangsa sejak Indonesia merdeka.

Politik dalam negeri dan politik luar negeri sesungguhnya adalah dua sisi dari satu mata uang dalam proses konsolidasi demokrasi Indonesia. Dunia yang menyempit karena berbagai perkembangan teknologi informasi yang pesat dan keterkaitan ekonomi global membuat politik dalam negeri dan politik luar negeri sangat tergantung erat satu sama lain. Karena ada korelasi yang sangat esensial dari politik dalam negeri dan politik luar negeri, maka kedua substansi ini tidak dipisahkan ke dalam dua bab terpisah. Keduanya dimasukkan ke dalam satu bab dan dipisahkan pembahasannya ke dalam sub bidang masing-masing. Hal ini dilakukan mengingat luasnya cakupan permasalahan dan sasaran pembangunan masing-masing, walaupun pada gilirannya keduanya memiliki satu tujuan jangka panjang, yakni mendukung konsolidasi demokrasi yang berkelanjutan.

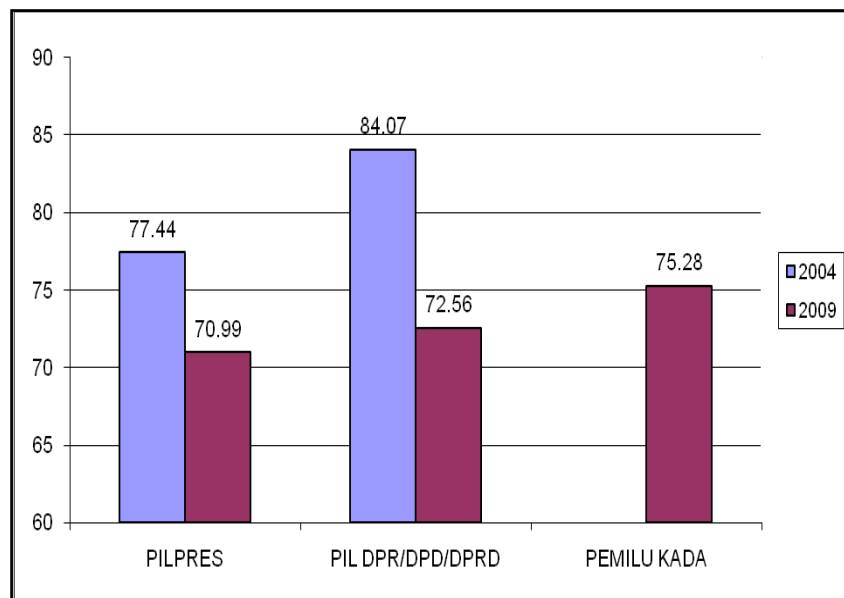
6.1 Subbidang Politik Dalam Negeri dan Komunikasi

6.1.1 Kondisi Umum

Perjalanan demokrasi selama 5 tahun terakhir memberikan pengalaman tak ternilai bagi bangsa Indonesia. Dalam 5 tahun terakhir, kondisi aman dan damai dapat dipulihkan dan dipelihara, terutama di daerah-daerah konflik, seperti Nanggroe Aceh Darusalam, Maluku, Poso dan Papua; dan tidak dimungkiri juga bahwa dalam lima tahun terakhir masih terjadi insiden kekerasan antarkelompok, adanya tindak kekerasan, atau anarkis dalam proses pemilihan kepala daerah, dan adanya persoalan korupsi. Lebih lanjut, kebebasan sipil menunjukkan kinerja yang positif yang dapat dilihat dari semakin baiknya jaminan antara lain terhadap kebebasan berpendapat, kebebasan berkumpul, dan berserikat. Pemenuhan hak-hak politik masih terkendala oleh adanya

persoalan dalam peraturan dan penyelenggaraan pemilu dan pemilihan kepala daerah, yang antara lain berdampak pada menurunnya tingkat partisipasi politik rakyat dalam pemilu dan pemilihan kepala daerah. Dalam Pemilu Legislatif 2009, angka partisipasi politik mencapai 70,99%, sedangkan pada Pemilu Presiden 2009, tingkat partisipasi politik rakyat mencapai 72,56%. Jika dibandingkan dengan tahun 2004, tingkat partisipasi politik dalam Pemilu Presiden dan Pemilu Legislatif masing-masing mencapai 77,44% dan 84,07%. Partisipasi politik dalam pemilu kepala daerah sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2008 adalah 75,28%. Perlu mendapatkan catatan bahwa perkembangan demokrasi di Indonesia ditandai pula dengan dipilihnya seluruh kepala daerah di tingkat provinsi dan kabupaten/kota seluruh Indonesia secara langsung oleh rakyat. Secara umum, penyelenggaraan pemilu dan seluruh pemilihan kepala daerah berjalan dengan aman dan damai. Semua ini merupakan modalitas yang sangat berarti bagi kemajuan demokrasi di tanah air pada masa mendatang.

GRAFIK 6.1
PROSENTASE PARTISIPASI PEMILU PRESIDEN,
PEMILU ANGGOTA DPR/DPD/DPRD PEMILU KEPALA DAERAH



Sumber : KPU; Kemdagri

Pada sisi perkembangan kinerja institusi demokrasi, selama 5 tahun terakhir, Indonesia juga telah mengalami proses transformasi politik yang berarti bagi konsolidasi demokrasi. Lembaga-lembaga penyelenggara negara yang telah ada terlihat



bergerak maju secara lebih dinamis dalam melaksanakan peran dan fungsi yang diberikan oleh Konstitusi. Di samping itu, lembaga-lembaga independen yang didirikan pada era reformasi menunjukkan kinerja yang baik. Dengan berbagai capaian yang diraih tersebut, secara umum dapat dikatakan bahwa Indonesia sedang bergerak maju dalam proses demokratisasi.

Pemilu dan Pemilu Kepala Daerah

Sepanjang tahun 2007 sampai dengan tahun 2009 sejumlah landasan struktural penting telah berhasil diselesaikan dalam proses perwujudan lembaga demokrasi yang makin kukuh untuk memberikan landasan yang kuat bagi proses konsolidasi demokrasi yang berkelanjutan terutama untuk menghadapi penyelenggaraan Pemilu 2009. Undang-undang politik yang baru adalah UU No. 22 tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu, UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan UU No.10 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta UU No. 42 tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Pada Agustus 2009 telah pula ditetapkan undang-undang terbaru bidang politik, yakni UU No. 27 tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, sebagai pengganti UU No. 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Pengubahan judul dengan menghapus frasa “Susunan dan Kedudukan” yang tercantum dalam UU No. 22 Tahun 2003 dimaksudkan untuk tidak membatasi pengaturan yang hanya terbatas pada materi muatan susunan dan kedudukan lembaga, tetapi juga mengatur hal-hal lain yang lebih bersifat komprehensif.

Satu tonggak penting dalam proses pelembagaan demokrasi melalui proses penyelenggaraan pemilu adalah adanya keputusan Mahkamah Konstitusi yang menetapkan calon anggota legislatif terpilih berdasarkan perolehan suara terbanyak, tidak lagi berdasarkan nomor urut yang ditetapkan oleh partai politik yang ikut dalam pemilu legislatif. Pada tahun 2007 demokrasi Indonesia juga mencapai kemajuan serupa, yakni dengan diperbolehkannya keikutsertaan calon independen dalam pilkada melalui penetapan keputusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan *judicial review* terhadap UU No.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Hal ini merupakan tonggak penting bagi perluasan ruang kebebasan politik masyarakat luas dan peningkatan kualitas proses rekrutmen kepemimpinan politik di tingkat daerah di Indonesia karena calon independen diharapkan menjadi pemicu motivasi calon-calon dari parpol untuk mempersiapkan diri secara lebih baik.

Pada kenyataannya, terlepas dari berbagai kelemahan administratif dalam penyelenggaraannya, perundang-undangan bidang politik yang baru telah cukup mampu menjadi landasan politik bersama untuk mengakomodasikan dinamika dan aspirasi politik yang berkembang di kalangan masyarakat umum bagi perbaikan demokrasi pada umumnya, kinerja parlemen dan eksekutif pada khususnya. Politik Indonesia di parlemen pada 2009-2014 berbeda dengan parlemen pada era

sebelumnya. Hal ini merupakan konsekuensi logis pemberlakuan *parliamentary threshold*. Jumlah partai yang ada di parlemen menjadi jauh lebih sedikit, yakni hanya 9 (sembilan) parpol dari 38 peserta pemilu pada tingkat nasional, sedangkan pada Pemilu Legislatif 2004, dari 24 parpol peserta pemilu, 17 parpol mendapatkan kursi di parlemen.

Pemilu Legislatif dan Presiden/Wakil Presiden pada tahun 2009 dapat berjalan dengan demokratis, aman, dan damai. Perlu mendapatkan catatan bahwa Pemilu 2009 di Indonesia termasuk pemilu yang paling kompleks. Hal ini terjadi karena dalam satu hari diadakan pemilu untuk memilih 560 anggota DPR, 132 orang anggota DPD, dan 16.253 orang anggota DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota. Jumlah pemilih mencapai 171.265.442 orang, jumlah TPS sebanyak 519.920 buah, jumlah PPS sebanyak 76.711 orang, jumlah PPK sebanyak 6471 orang dan 471 KPU Kabupaten/Kota, serta 33 KPU Provinsi.

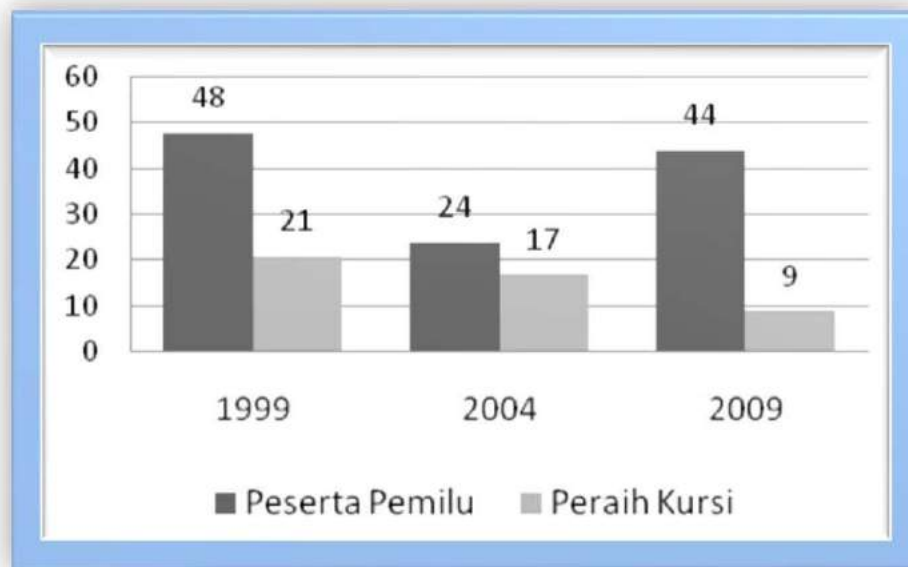
Penyelenggaraan Pemilu 2009 mengajarkan satu hal penting pada pemerintah, KPU, dan Bawaslu sebagai lembaga independen penyelenggara pemilu sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, yakni berkaitan dengan masih lemahnya sistem administrasi kependudukan yang menjadi dasar penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam pemilu nasional. Hak-hak dasar masyarakat sebagai warganegara yang sudah berhak memilih dalam pemilu sudah semestinya dijamin sepenuhnya tanpa kecuali. Terkait dengan persoalan DPT tersebut, Mahkamah Konsitusi satu hari menjelang pemilu presiden/wakil presiden 2009 menetapkan keputusan bahwa bagi warganegara yang telah berhak memilih dapat menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Paspor sebagai dokumen resmi untuk ditukarkan dengan surat suara pada hari pemilu. Keputusan tersebut merupakan hal yang sangat penting sebagai jalan ke luar dari permasalahan DPT pada waktu Pemilu Pilpres 2009.

Penyelenggaraan pemilu kepala daerah, sampai dengan akhir tahun 2008, secara umum berjalan relatif lancar dan aman. Perlu mendapat catatan penting bahwa sejumlah penyelenggaraan pemilu kepala daerah menunjukkan hasil-hasil yang menggembirakan, baik ditinjau dari segi proses penyelenggaraannya, partisipasi masyarakat dan keanekaragaman peserta yang ikut pilkada, maupun ditinjau dari hasil-hasil pilkada itu sendiri. Pemilu kepala daerah yang sudah berlangsung sejak 2005 telah meletakkan dasar-dasar tradisi berdemokrasi yang penting, berupa pembelajaran cara berpolitik dan berdemokrasi secara baik, serta kemampuan masyarakat untuk ikut serta mengawal seluruh proses penyelenggaraan pemilu kepala daerah sampai selesai. Hal lain, perlu mendapatkan catatan bahwa perkembangan demokrasi di Indonesia ditandai pula dengan dipilihnya seluruh kepala daerah di tingkat propinsi dan kabupaten/kota seluruh Indonesia secara langsung oleh rakyat. Semua ini merupakan modalitas yang sangat berarti bagi kemajuan demokrasi di tanah air pada masa mendatang.

Partai Politik

Sejak bergulirnya era reformasi, telah berdiri kurang lebih 160 partai politik di Indonesia. Pada Pemilu tahun 1999, 2004, dan 2009 masing-masing diikuti oleh sebanyak 48, 24 dan 44 partai politik, termasuk 6 parpol lokal menjadi kontestan Pemilu. Partai politik saat ini tidak hanya sekedar memberikan legitimasi, tetapi juga membentuk kekuasaan. Fungsi partai politik adalah mewakili ekspresi politik dan pilihan, membangun kompetisi kepemiluan dan dialog politik, mewakili agregasi dan artikulasi kepentingan sosial, serta menyiapkan sosialisasi politik.

GRAFIK 6.2
JUMLAH PARTAI PESERTA PEMILU DAN PERAIH KURSI



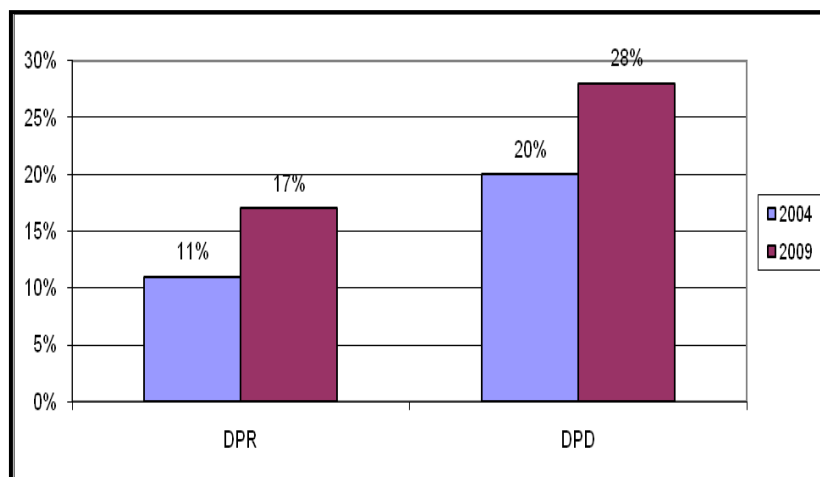
Sumber: KPU

Dalam pemilu 2009, partai politik dapat berkompetisi dengan adil. Para elit politik memiliki kemampuan dan kesadaran yang tinggi untuk menyelesaikan sengketa melalui jalur hukum. Di sisi lain, partai politik di mata publik menunjukkan citra yang kurang mengembirakan.

Pada dimensi politik kepartaian, hal yang penting juga adalah soal peran perempuan dalam struktur kepengurusan parpol dan parlemen. UU No. 10 tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD dan UU No 2 tahun 2008 tentang Partai

Politik jelas mengamanatkan kuota 30% keterwakilan perempuan dalam kepengurusan parpol di tingkat pusat dan daerah dalam daftar yang diajukan untuk calon anggota legislatif. Hal ini jelas merupakan hal yang positif di dalam upaya mempromosikan hak-hak perempuan dalam kehidupan politik di tanah air. Pemenuhan angka kuota tersebut ternyata tidaklah semudah yang diharapkan semula. Namun, perlu dicatat bahwa representasi perempuan di DPR hasil pemilu 2009 menunjukkan kenaikan, yaitu menjadi 17% dari 11% hasil pemilu 2004. Sebaliknya, representasi perempuan pada DPD hasil pemilu 2009 menjadi 28% dari 20% sebagai hasil pemilu 2004, sebagaimana tergambar dalam Grafik 6.4 di bawah ini. Perlu dicatat bahwa kenaikan tersebut merupakan hasil perjuangan atau kompetisi politik tanpa metodaperekayasa politik, seperti alokasi jumlah kursi atau pun penunjukan.

GRAFIK 6.3
PERBANDINGAN REPRESENTASI PEREMPUAN DALAM DPR DAN DPD
HASIL PEMILU 2004 DAN 2009



Sumber: KPU

Masyarakat Sipil dan Organisasi Masyarakat Sipil

Karakteristik dan kemajuan penting yang telah diraih selama ini adalah bahwa masyarakat sipil Indonesia menunjukkan kedermawanan dan keaktifan berorganisasi. Berdasarkan studi Indeks Masyarakat Sipil Yappika (tahun 2006), empat dari lima orang Indonesia pernah memberikan sumbangan dalam bentuk uang atau barang serta membantu warga lain. Lebih dari separuh rakyat Indonesia pernah menjadi anggota suatu organisasi masyarakat sipil dan satu dari tiga orang Indonesia pernah menjadi anggota lebih dari satu organisasi. Dari sisi lembaga, organisasi masyarakat sipil Indonesia cukup aktif dan sukses mempromosikan demokrasi, HAM dan



memberdayakan warganegara. Namun, di sisi lain, masyarakat sipil masih berada dalam posisi yang belum seimbang dengan posisi negara dan swasta; posisi negara dan swasta masih lebih kuat dari masyarakat sipil.

Lembaga Perwakilan

Konstitusi telah memperkuat fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan DPR. Penguatan tersebut merupakan langkah penting dalam menciptakan keseimbangan kekuasaan di antara lembaga penyelenggara negara, khususnya antara legislatif dan eksekutif.

Dalam pelaksanaan fungsi legislasi, jumlah RUU prioritas tahunan ditambah dengan jumlah RUU kumulatif terbuka selama 2005—2009 berjumlah 335 RUU. Dalam praktiknya RUU yang dibahas DPR tidak seluruhnya berasal dari prioritas tahunan, tetapi dari RUU yang dianggap penting di luar RUU yang masuk dalam Prolegnas 2005—2009. Dari total 335 RUU di atas, telah disetujui dan disahkan sebanyak 193 RUU. Dalam hal pelaksanaan fungsi anggaran, setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelaksanaan fungsi anggaran tidak hanya sebatas pembahasan dan penetapan APBN tetapi mempunyai korelasi dengan hal keuangan negara. Hingga Agustus 2009, DPR telah mengesahkan 16 RUU tentang APBN. Dalam pelaksanaan fungsi pengawasan, DPR mengawasi eksekutif dalam menjalankan atau melaksanakan UU dan APBN serta pengawasan terhadap kebijakan pemerintah melalui berbagai instrumen pengawasan, termasuk rapat kerja dan pembentukan panitia yang bertugas menanggapi aspirasi dan permasalahan yang berkembang di masyarakat. Peran pemerintah dibatasi pada pemberian fasilitas dukungan bagi kelancaran ketiga fungsi tersebut.

Berkenaan dengan DPD, sampai dengan akhir tahun kelima telah dihasilkan 186 keputusan yang terdiri atas 16 buah usul RUU, 95 buah pandangan, pendapat, dan pertimbangan tentang berbagai RUU baik yang berasal dari DPR maupun dari Pemerintah, dan 47 buah produk hasil pengawasan serta 28 buah pertimbangan yang berkaitan dengan anggaran. Kemudian, MPR selama ini telah melaksanakan perannya dalam melakukan sosialisasi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia, nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika, dan Ketetapan MPR kepada masyarakat dengan berbagai metode. Peran pemerintah sebatas memfasilitasi untuk memberikan dukungan terhadap kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi MPR, DPR, dan DPD.

Hubungan Kelembagaan

Pasca amandemen perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, terdapat perubahan besar, yaitu dengan tidak dikenalnya lagi lembaga

tertinggi Negara dan Lembaga Tinggi Negara yang ada hanya Lembaga Negara; dihapuskannya DPA sebagai salah satu lembaga tinggi Negara, dibentuknya lembaga Negara baru lainnya, seperti Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Mahkamah Konstitusi (MK), serta dibentuknya beberapa lembaga Negara Bantu (*the auxiliary state*) yang tugasnya untuk membantu lembaga Negara yang sudah ada dan bertujuan untuk membantu pelaksanaan tugas lembaga yang diatur dalam konstitusi.

Perkembangan paling membesarkan hati justru terlihat dari kinerja lembaga-lembaga negara yang relatif baru dalam kancah demokrasi di Indonesia. MK telah mampu menunjukkan kapasitasnya dalam mengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*) melalui respon yang tanggap terhadap berbagai tuntutan *judicial review* pada undang-undang yang dianggap bertentangan dengan konstitusi oleh warganegara Indonesia, sebagai pemegang sah kedaulatan. Angin segar lain dalam hal penegakan hukum adalah adanya kinerja KPK yang telah mampu mengambil tindakan-tindakan berarti dalam melakukan investigasi disertai penangkapan terhadap para pelaku tindakan korupsi kerah putih di Indonesia. Terhadap hal ini, masyarakat pada umumnya menaruh rasa hormat dan harapan yang tinggi pada KPK.

Penanganan Konflik dan Pascakonflik.

Selama lima tahun terakhir, upaya yang tidak kenal lelah dari pemerintah untuk menyelesaikan konflik-konflik di daerah dan memelihara keadaan tenang banyak membawa hasil positif.

Aceh. Khusus di NAD, stabilitas sosial politik yang terjadi tidak terlepas dari keberhasilan program reintegrasi yang telah dilaksanakan melalui kerja sama pemerintah dan pemerintah Provinsi NAD, serta peran forum komunikasi dan koordinasi yang menjadi wadah bagi penyelesaian masalah yang berkaitan dengan agenda perdamaian yang telah disepakati. Situasi yang semakin kondusif merupakan hasil dari upaya-upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat Aceh seluruhnya. Fondasi perdamaian yang dimulai dengan perjanjian perdamaian Helsinki, dan berlanjut dengan pemberlakuan UU No. 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UU PA) menjadi kunci penting bagi terciptanya suasana damai dalam masyarakat NAD dan berjalannya proses pembangunan yang semakin mantap di NAD. Sebagai penjabaran dari UU PA, Pemerintah telah memfasilitasi penetapan PP No. 20 tahun 2007 tentang Partai Politik Lokal di Aceh. Bahkan, lebih jauh dari itu, suasana sosial politik yang kondusif di NAD telah menghasilkan kepemimpinan politik harapan rakyat Aceh melalui Pilkada Gubernur dan Kabupaten/Kota yang berlangsung dengan aman dan damai serta dinilai jujur dan demokratis. Semua yang telah dicapai tersebut sangat penting bagi keberlanjutan proses pembangunan di segala bidang, dan menjadi barometer bagi upaya meningkatkan harmonisasi kehidupan sosial politik di NAD.



Papua. Di Papua, situasi yang relatif kondusif antara lain merupakan sumbangan dari penguatan implementasi Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua sesuai dengan UU No. 21 tahun 2001 dan penerapan Inpres No. 5 tahun 2007 tentang Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat yang sering disebut dengan *New Deal Policy for Papua*. Pada tahun 2008 telah ditetapkan PP No. 64 tahun 2008 tentang Perubahan PP No. 54 tahun 2004 tentang Majelis Rakyat Papua (MRP) khususnya yang menyangkut keuangan MRP. Pemerintah terus berupaya untuk mendorong efektivitas penyelenggaraan pemerintahan di daerah berdasarkan otonomi daerah dan otonomi khusus, mendorong kehidupan politik yang sehat yang mengacu kepada 4 konsensus dasar, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Poso, Maluku, dan Maluku Utara. Pada umumnya, situasi sosial politik di Poso Sulawesi Tengah semakin kondusif yang ditandai dengan tumbuh dan terciptanya rasa aman dan damai, serta semakin baiknya kondisi yang harmonis dalam masyarakat. Kondisi yang kondusif tercipta juga di Maluku dan Maluku Utara. Pemerintah daerah saat ini sedang dan terus melanjutkan hasil yang telah dicapai selama 4 tahun sebagai pelaksanaan Inpres No. 6 tahun 2003 tentang Percepatan Pemulihan Pembangunan Provinsi Maluku dan Maluku Utara pasca konflik. Melalui dukungan dan dorongan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas pemerintahan di daerah, pelaksanaan rehabilitasi serta upaya dialog dan komunikasi efektif serta pendampingan terhadap masyarakat, Inpres tersebut telah menjadi pilar penting untuk pemulihan perdamaian yang berkelanjutan di Maluku dan Maluku Utara.

Hubungan yang Harmonis dalam Masyarakat.

Demokratisasi, selain telah mengembalikan hak-hak politik dan hak-hak sipil masyarakat, ternyata juga telah menciptakan eksekutif berupa berkembangnya ideologi kekerasan dan terorisme di dalam masyarakat. Pemerintah yang terpilih secara demokratis saat ini menyadari dan terus berupaya memberikan teladan bahwa melawan radikalisme dan terorisme harus tetap dilakukan melalui mekanisme demokratis, bukan dengan menggunakan cara-cara di luar hukum, teror, dan kekerasan yang sama kejamnya. Dalam menyikapi persoalan-persoalan SARA, upaya yang telah dilakukan Pemerintah adalah melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah untuk mengatasi dan mencegah timbulnya persoalan SARA, dan antara lain menerbitkan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 dan 8 tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadah.

Dalam rangka mencegah kerawanan sosial, sejak tahun 2006 pemerintah terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk meningkatkan kewaspadaan secara dini masyarakat terhadap kemungkinan terjadinya benturan dalam masyarakat itu

sendiri. Koordinasi ini didukung dengan penerbitan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 12 tahun 2006 tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 11 tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen Daerah. Di samping itu, sebagai upaya untuk mendukung pembauran dalam masyarakat, koordinasi dengan pemerintah daerah didukung dengan penerbitan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 34 tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah. Upaya lain yang dilakukan adalah memantapkan peran pemerintah sebagai fasilitator dan mediator dalam mengatasi berbagai persoalan untuk menjaga dan memelihara persatuan dan kesatuan, perdamaian, dan harmoni dalam masyarakat.

Dalam menindaklanjuti berbagai kebijakan atau peraturan yang dikeluarkan tersebut, pemerintah telah pula melakukan fasilitasi pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di 33 provinsi, 241 kabupaten, dan 65 kota. Pemerintah juga telah memfasilitasi pembentukan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) di 24 provinsi dan 57 kabupaten/kota, pembentukan Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA) di 33 provinsi dan 425 kabupaten/kota, serta Forum Pembaruan Kebangsaan (FPK) di 11 provinsi dan 16 kabupaten/kota. Dalam konteks persatuan dan kesatuan bangsa, Pemerintah menerbitkan PP No. 77 tahun 2007 tentang Lambang Daerah sebagai tanda identitas Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menggambarkan potensi daerah, harapan masyarakat daerah, dan semboyan yang melukiskan harapan dimaksud.

Pemerintah juga melakukan upaya mendorong penerapan nilai-nilai ideologi Pancasila, termasuk di dalamnya nilai persatuan dan kesatuan, serta cinta tanah air melalui program wawasan kebangsaan dan cinta tanah air. Program tersebut merupakan kerja sama pemerintah dengan ratusan organisasi masyarakat sipil yang ada di Indonesia. Pemerintah menyadari bahwa peran organisasi masyarakat sangatlah penting untuk menjadi garda terdepan dalam mewujudkan konsensus penyelesaian masalah dalam masyarakat itu sendiri.

Penyediaan dan Penyebaran Informasi Publik.

Perkembangan demokrasi Indonesia ditandai pula dengan ditetapkannya UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) dan akan berlaku secara efektif pada tahun 2010. Undang-undang ini merupakan produk penting untuk menjamin pelebagaan atas hak-hak masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan informasi yang selengkap mungkin dari sumber yang seluas-luasnya tentang proses politik dan penyelenggaraan negara. Sebelum menetapkan UU KIP, pemerintah dan DPR juga sudah menetapkan UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kedua perundangan bidang informasi di atas memberikan batasan-batasan penting mengenai apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, dan lembaga/badan publik lainnya dalam kaitannya dengan implikasi hak-hak masyarakat untuk mendapatkan akses yang seluas mungkin atas sumber-sumber



informasi publik yang strategis.

Dalam mempersiapkan berlaku efektifnya UU KIP, beberapa upaya tengah dilakukan untuk merampungkan Peraturan Pemerintah (PP), Petunjuk Teknis (Juknis), infrastruktur, sarana/prasarana serta hal-hal lain yang terkait dengan pemberlakuan undang-undang dimaksud. Sesuai dengan amanat UU KIP, telah dibentuk pula Komisi Informasi Pusat pada bulan Juni 2009, dan juga telah dilakukan sosialisasi untuk pemahaman UU KIP di 20 provinsi dan beberapa Kementerian/ Lembaga di tingkat pusat.

Pemerintah terus mengupayakan penyempurnaan sejumlah fasilitas penyebaran informasi publik terutama kebijakan pemerintah di bidang politik, hukum, dan keamanan (polhukkam), perekonomian, kesejahteraan sosial, dan pengelolaan pendapat umum. Penyebaran informasi publik rutin dilakukan melalui berbagai media, antara lain, media cetak, elektronik, dan forum/dialog/pertunjukan rakyat. Penyebaran informasi ini akan terus dilanjutkan dan ditingkatkan kualitas, kuantitas dan daya jangkauannya, sehingga dapat menjadi jembatan komunikasi yang efektif dan efisien antara negara dan masyarakat di dalam dan luar negeri.

Pemerintah telah menjadi fasilitator untuk memperkuat lembaga penyiaran publik TVRI dan RRI melalui penyempurnaan kerangka regulasi dan anggaran, agar mampu tumbuh menjadi lembaga penyiaran publik yang modern, seperti lembaga penyiaran publik berskala nasional dan internasional di mancanegara. Di samping itu, pemerintah memberikan pula fasilitasi bagi munculnya media-media komunitas yang lebih bermutu untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan khusus masyarakat atas informasi publik dalam komunitas masing-masing.

Selain itu, selama ini pemerintah selalu melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dan mengembangkan sarana/jaringan komunikasi sosial, terutama media tradisional untuk meningkatkan komunikasi antara pusat dan daerah, dan mengatasi hambatan dan kendala penyebaran informasi ke wilayah-wilayah terpencil dan terdepan. Di samping itu, telah dibangun dan dikembangkan *media centre* di 30 provinsi dan 75 kabupaten/kota sebagai sarana bagi masyarakat untuk mengakses informasi. Pemerintah juga tetap berusaha meningkatkan pelayanan informasi melalui penyediaan mobil unit operasional untuk daerah yang belum terjangkau oleh infrastruktur informasi. Tujuannya diharapkan agar rakyat di daerah dimaksud dapat ikut mengetahui dan mulai ikut serta berpartisipasi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Hal lain, Pemerintah telah dan akan terus mengupayakan fasilitasi penguatan lembaga-lembaga mitra, seperti Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Komisi Informasi, Dewan Pers, dan LKBN Antara.

6.1.2 Permasalahan dan Sasaran Pembangunan

Meskipun berbagai capaian telah diraih selama 5 tahun terakhir, potensi permasalahan perlu diantisipasi dan perlu mendapatkan respon agar proses

demokratisasi selanjutnya dapat dijaga secara berkesinambungan dan mendapatkan momentum yang positif secara terus menerus.

6.1.2.1 Permasalahan

Pemilu dan Pemilu Kepala Daerah

Permasalahan yang dihadapi dalam Pemilu 2009 dan pemilihan kepala daerah adalah terkait dengan peraturan dan penyelenggaraan tahapan yang kurang tepat, data pemilih yang belum akurat, distribusi logistik yang kurang tepat waktu dan sasaran, pendidikan pemilih yang masih terbatas dan kurang tepat waktu. Secara keseluruhan, permasalahan tersebut membawa dampak pada kualitas penyelenggaraan pemilu. Pendidikan pemilih yang belum cukup memadai berkontribusi salah satunya pada tingkat partisipasi aktif warga negara yang menurun pada tahun 2009 jika dibandingkan dengan hasil Pemilu 2004. Oleh karena itu, dalam lima tahun ke depan pelembagaan proses pemilu dan pemilihan kepala daerah menjadi hal penting yang harus dilakukan agar persoalan-persoalan yang muncul pada penyelenggaraan Pemilu 2009 dan pemilihan kepala daerah sebelumnya tidak terulang kembali.

Permasalahan dan agenda penting dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah adalah pengantisipasi dan penindaklanjutan sejumlah aspirasi dan wacana yang berkembang secara cukup luas mengenai pemilihan kepala daerah, yang selama ini dilakukan secara langsung di semua tingkat pemerintahan daerah, baik di tingkat provinsi, kabupaten maupun kota untuk memilih gubernur, bupati, dan walikota. Perlu dilakukan pengkajian yang sungguh-sungguh mengenai pemilihan gubernur yang dilakukan secara langsung oleh rakyat dan/atau dipilih melalui DPRD. Selain itu, perlu pula dilakukan pengkajian yang lebih mendalam mengenai wacana pemisahan pemilihan kepala daerah dari materi UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Kajian tersebut perlu dilaksanakan secara seksama, karena keputusan apa pun yang diambil akan berdampak luas dalam proses demokratisasi Indonesia. Konsolidasi demokrasi di Indonesia jelas harus terus berlanjut dengan kecepatan penuh karena hal itu merupakan amanat konstitusi dan perundang-undangan, tanpa menutup kemungkinan untuk melakukan evaluasi dan koreksi apabila diperlukan.

Partai Politik (Parpol)

Tingginya partisipasi politik rakyat untuk berorganisasi di dalam berbagai partai politik belum diikuti oleh kinerja parpol yang optimal dalam melaksanakan fungsi-fungsi utama parpol seperti agregasi dan artikulasi politik, komunikasi politik, dan pendidikan politik. Parpol pun menghadapi beberapa persoalan internal organisasinya, seperti konflik internal dalam pergantian kepengurusan, belum berjalan optimalnya proses kaderisasi dan mekanisme rekrutmen, lemahnya kemampuan dan kapasitas



kader dan fungsionaris partai dalam membangun dan mempraktikkan dasar-dasar demokrasi, dan lemahnya sistem demokrasi internal dalam partai politik. Dampak dari kinerja yang belum optimal adalah lemahnya kepercayaan publik terhadap partai politik.

Perempuan dalam Politik

Struktur perundangan untuk meningkatkan peranan perempuan dalam politik telah mengalami banyak penyempurnaan. Namun, kondisi ini belum mampu mengubah realitas peran perempuan dalam lembaga-lembaga politik. Kendala perjuangan untuk menempatkan representasi dan peran politiknya dalam lembaga-lembaga politik disebabkan oleh ketidaksiapan perempuan untuk memasuki dunia politik, kompetisi internal partai politik, dan kompetisi di antara perempuan itu sendiri. Kendala lainnya adalah terkait faktor eksternal, seperti budaya patriakal yang menempatkan laki-laki pada posisi yang lebih dominan, dan masih banyaknya dianut paradigma bahwa dunia politik adalah kotor dan hanya cocok untuk laki-laki. Selain itu, perempuan juga masih belum dianggap sebagai kelompok yang berhak memiliki peran independen dalam melakukan aktualisasi diri di bidang sosial dan politik, serta belum memiliki akses yang sama ke dalam sumber-sumber pengetahuan dan pendidikan.

Organisasi Masyarakat Sipil

Kapasitas dan kiprah organisasi masyarakat sipil juga masih belum cukup memadai untuk terlibat dalam penyusunan kebijakan publik dan melakukan pengawasan kepada penyelenggara negara. Kegiatan-kegiatan organisasi masih bersifat kasuistis dan sporadis, serta tidak berkelanjutan. Berbagai kinerja yang kurang memadai ini disebabkan oleh kelemahan organisasi masyarakat sipil yang berakar pada beberapa hal internal berikut ini. *Pertama*, lemahnya manajemen pengelolaan organisasi termasuk di dalamnya kurang melakukan kaderisasi dan pengelolaan SDM yang tepat, serta belum memiliki jaringan yang luas di kalangan masyarakat sipil. *Kedua*, rendahnya akses organisasi terhadap informasi. *Ketiga*, minimnya dukungan prasarana, pelatihan, permodalan serta akses distribusi dan pemasaran pada proses pengembangan unit-unit produksi OMS. *Keempat*, keterbatasan proses pertukaran gagasan, pengalaman, dan pembelajaran antar-organisasi masyarakat antar wilayah karena keterbatasan mobilitas mereka. Hal lain, OMS tidak terbebas pula dari persoalan tidak transparan dan korupsi.

Selain itu, kegiatan advokasi yang dilakukan oleh kalangan organisasi masyarakat sipil masih akan dihadapkan pada permasalahan tidak dimilikinya ikatan yang jelas dengan konstituen atau kelompok-kelompok masyarakat yang diperjuangkannya. Kritik ini menunjuk secara jelas pada dua hal: *pertama*, banyak kegiatan advokasi yang dilakukan selama ini yang lebih didorong oleh pikiran sepihak dari para pengagasnya,

daripada hasil rumusan kolektif dari kelompok-kelompok masyarakat yang secara langsung dirujuk di dalam kerangka kerja advokasi tersebut. *Kedua*, kritik tersebut menunjuk kepada lemahnya pengorganisasian OMS di dalam upaya-upaya untuk mendorong perubahan. Bahkan, dalam banyak kasus seringkali kegiatan advokasi yang dilakukan itu menggunakan cara-cara kerja dengan memobilisasi rakyat atau kelompok-kelompok masyarakat korban sebagai barisan pagar betis daripada mengorganisasi masyarakat sebagai basis dari perubahan itu sendiri. Permasalahan lainnya yang dihadapi oleh organisasi masyarakat sipil adalah persoalan pendanaan yang membawa konsekuensi keberlanjutan organisasi. Persoalan ini merupakan persoalan penting yang perlu dicarikan jalan pemecahannya.

UU No. 8 tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang menjadi dasar dan koridor bekerjanya organisasi masyarakat sipil sudah tidak cukup akomodatif dalam merespon proses demokratisasi saat ini yang terus berkembang. UU tersebut belum cukup akomodatif meningkatkan peran masyarakat sipil, serta mengakomodasikan kesadaran masyarakat yang meningkat mengenai hak-hak demokratis mereka. Negara perlu mendukung perumusan perundang-undangan yang memberikan pengakuan, peluang, dan dukungan atas independensi masyarakat sipil dalam proses pengembangan demokrasi dan pencapaian kesejahteraan rakyat. Pada saat bersamaan perlu terus dibangun peningkatan dialog dan konsultasi antara negara dengan organisasi masyarakat sipil yang dilandasi dengan semangat kemitraan yang setara.

Lembaga Perwakilan

Tantangan lima tahun ke depan bagi DPR adalah melaksanakan secara optimal fungsi-fungsi DPR di dalam melaksanakan penyusunan legislasi, pengawasan, dan penganggaran. Tidak hanya lembaga DPR, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) akan juga menghadapi tantangan ke depan untuk melaksanakan fungsinya secara optimal sesuai dengan amanat Konstitusi dan peraturan perundangan yang berlaku. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menghadapi tantangan untuk melaksanakan tugasnya terutama melakukan sosialisasi empat pilar konsensus nasional yang meliputi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia, nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika, dan putusan MPR lainnya kepada masyarakat. Tantangan bagi MPR adalah masih rendahnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap empat pilar konsensus tersebut serta mengenai fungsi dan keberadaan lembaga-lembaga negara dalam struktur ketatanegaraan. Selain itu, tugas yang tidak kalah pentingnya adalah tugas MPR dalam rangka mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan Sidang MPR apabila terdapat usulan untuk mengubah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta apabila terjadi kekosongan jabatan Presiden dan/atau Wakil Presiden pada masa jabatannya.



Pengembangan rumah aspirasi rakyat bagi DPR dalam lima tahun ke depan perlu didorong dan difasilitasi untuk memberikan jaminan bahwa perjuangan aspirasi masyarakat dapat ditindaklanjuti dan menjadi suatu kebijakan yang dapat memberikan manfaat positif bagi masyarakat sebagaimana dikehendaki oleh masyarakat.

Rumah aspirasi DPD melalui Sekretariat Provinsi DPD di daerah yang akan dibentuk di 33 provinsi merupakan agenda ke depan yang tentunya perlu difasilitasi dan didorong pula oleh berbagai pihak. Aspirasi rakyat perlu mendapat perhatian dan perlu diperjuangkan oleh para wakil mereka di DPD terutama untuk membantu proses pembangunan dan kemajuan di daerah.

Secara politis kedudukan DPR dan pemerintah sudah menunjukkan keseimbangan yang positif. Tantangan ke depan adalah tuntutan masyarakat yang menghendaki kinerja yang prima dari DPR dan pemerintah. Dalam mewujudkan hal tersebut, di samping peningkatan kapasitas lembaga masing-masing, kedua lembaga penyelenggara negara perlu meningkatkan komunikasi yang intensif dan berjalan efektifnya mekanisme *checks and balances*.

Permasalahan dalam lembaga perwakilan adalah adanya potensi keterputusan elektoral (*electoral disconnection*) atau kesenjangan hubungan personal dan intensitas komunikasi dan kontrol aktif para konstituen yang memilih dalam pemilu terhadap para wakil-wakil rakyat di parlemen dan eksekutif. Dalam lima tahun ke depan, peningkatan profesionalitas dan kapasitas lembaga legislatif termasuk di dalamnya kapasitas komunikasi politik yang efektif merupakan tantangan yang perlu didukung oleh berbagai pemangku kepentingan. Kelancaran dukungan perlu juga diperkuat oleh kapasitas sekretariat internal lembaga perwakilan.

Hubungan Kelembagaan

Permasalahan aktual dan strategis lainnya yang tidak bisa diabaikan dalam demokrasi di Indonesia adalah, *pertama* hubungan eksekutif dan legislatif yang masih berpotensi menghambat efektivitas pelaksanaan fungsi lembaga itu masing-masing. Pada beberapa tingkat hubungan kelembagaan, tidak jarang terjadi kebuntuan politik dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini merupakan gejala dari belum konsistennya penerapan sistem presidensiil di satu sisi dengan masih belum mantapnya sistem *checks and balances* di kedua lembaga penyelenggara negara. Persoalan sistemik konstitusional diperparah oleh masih belum mantapnya budaya dan etika berpolitik. *Kedua*, masih adanya hubungan kelembagaan yang belum mantap di dalam lembaga perwakilan rakyat sendiri karena belum adanya kesepahaman terkait posisi lembaga DPD dalam demokrasi Indonesia, dikaitkan latar belakang dan tujuan terbentuknya lembaga yang relatif baru ini. Ketidaksepakatan ini tentu perlu diselesaikan dengan proses demokratis melalui mekanisme konstitusional yang bisa diterima oleh semua pihak. Intensitas komunikasi akan memberikan peluang untuk dapat saling memahami

pola pikir dan ide masing-masing, dan sekaligus dapat melahirkan ide-ide besar untuk kepentingan masyarakat luas. Pola komunikasi yang intensif dan informal perlu ditingkatkan tetapi tanpa menghilangkan sikap kritis yang dapat mengorbankan tidak bekerjanya mekanisme *checks and balances* hubungan antarlembaga sebagai prasyarat bekerjanya demokrasi Indonesian.

Penanganan Konflik dan Pascakonflik

Meskipun stabilitas sosial politik di beberapa daerah pascakonflik dapat terjaga dalam 5 tahun terakhir, potensi konflik masih tetap ada dan sewaktu-waktu dapat muncul kembali. Masyarakat Indonesia yang majemuk di satu sisi merupakan aset nasional, tetapi di sisi lain dapat merupakan salah satu faktor yang dapat menciptakan suasana tidak harmonis di dalam masyarakat apabila tidak dikelola dengan baik.

Khusus yang terkait dengan wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darusalam (NAD), tertundanya penyelesaian peraturan pelaksana UU No. 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, yaitu penyelesaian 10 PP, 1 Perpres, dan pembentukan pengadilan HAM serta Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, berpotensi mengikis kepercayaan masyarakat Aceh yang telah dibangun sejak tahun 2005 hingga saat ini. Begitu pun halnya dengan Papua, tertundanya penyelesaian peraturan pelaksanaan UU No. 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua belum dapat dicapai solusinya. Akar persoalan terletak pada perbedaan acuan hukum yang digunakan oleh Gubernur dan Majelis Rakyat Papua (MRP). Gubernur menggunakan UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sedangkan MRP menggunakan UU Otonomi Khusus. Di samping perbedaan acuan hukum yang digunakan, kendala koordinasi dan komunikasi juga menjadi penyebab tidak tercapainya pemecahan hingga saat ini. Apabila masalah ini tidak segera dipecahkan, kepercayaan di dalam masyarakat dan antarpemerintahan akan semakin menipis dan berpotensi membuka peluang adanya konflik baru.

Penciptaan Hubungan yang Harmonis di Dalam Masyarakat

Cara-cara yang tidak demokratis seperti perilaku anarkis dan pembunuhan lawan politik dengan menggunakan isu SARA dalam menyikapi proses politik, seperti pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah, serta masih rendahnya kemampuan menghargai perbedaan di dalam masyarakat karena primordialisme sempit masih akan memberikan kontribusi terhadap suasana yang tidak harmonis di dalam masyarakat. Tanpa antisipasi dan penanganan yang tepat, persoalan tersebut akan membawa dampak terhadap adanya tindakan dan perilaku kekerasan yang menodai proses demokratisasi yang sedang berjalan.

Permasalahan yang saat ini cukup mencemaskan adalah adanya penurunan rasa



nasionalisme dan kebangsaan di masyarakat terutama kalangan generasi penerus. Apabila hal ini terus dibiarkan, pada akhirnya akan berdampak negatif terhadap keutuhan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Hal yang juga mencemaskan adalah tidak dikenal luasnya empat (4) pilar penting konsensus bangsa, yakni Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai pedoman tertinggi kehidupan sosial politik seluruh bangsa. Padahal, esensi dari keempat pilar tersebut sangat relevan untuk dapat menyikapi berbagai kendala praktis dalam kehidupan sosial politik Indonesia dewasa ini, antara lain, *pertama*, sikap solidaritas dan perilaku toleran antar sesama saudara sebangsa tanpa memandang asal usul suku, ras, bahasa, dan agama; dan *kedua*, sikap taat pada hukum bagi setiap komponen bangsa dalam menyikapi setiap tindakan yang melawan hukum tanpa memandang asal usul, golongan, dan keyakinan politik.

Dalam menyikapi persoalan primordialisme sempit dan rendahnya penurunan nasionalisme dan kebangsaan tersebut, pendidikan dan internalisasi nilai-nilai demokrasi merupakan keniscayaan. Namun, tantangannya terletak pada keterbatasan kemampuan dan pengalaman dalam merumuskan metode dan strategi pendidikan yang tepat dan inovatif untuk berbagai target sasaran yang berbeda dan sesuai dengan perubahan zaman. Metode dan strategi pendidikan yang kurang tepat tidak akan berdampak pada peningkatan pemahaman terhadap nasionalisme dan kebangsaan, pemahaman nilai-nilai demokrasi, seperti budaya toleransi, berkompetisi politik secara demokratis, dan penyelesaian masalah tanpa kekerasan.

Tidak hanya pendidikan politik dan kebangsaan, pemerintah juga melakukan pengembangan dialog antaragama melalui Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) yang bekerja sama dengan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan di daerah. Permasalahan yang dihadapi adalah belum efektifnya FKUB sebagai forum dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat, wadah penampung aspirasi ormas keagamaan dan aspirasi masyarakat dan menyalurkannya dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan pemerintah daerah, serta wadah untuk melakukan sosialisasi peraturan perundangan dan kebijakan di bidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat. Pada tingkat kabupaten/kota, FKUB kab/kota melaksanakan fungsi pemberian rekomendasi tertulis atas permohonan pendirian rumah ibadat secara tepat dan melalui mekanisme musyawarah. Begitu pula dengan forum-forum dialog lainnya yang saat ini telah terbentuk, menjaga eksistensi dan meningkatkan efektifitas forum dialog merupakan tantangan ke depan yang tidak ringan.

Dalam penanganan konflik dan penciptaan harmoni dalam masyarakat, peran pemerintah masih cukup penting dan masih tetap diperlukan. Namun, ketidakpercayaan (*distrust*) terhadap pemerintah masih tetap kental. Masyarakat masih seringkali mengemukakan keluhan-keluhannya terhadap kinerja birokrasi pemerintahan. Dari sisi politik, birokrasi dianggap belum sepenuhnya menerapkan prinsip netralitas. Dari sisi

kapasitas, birokrasi dianggap masih jauh dari efisien dalam melaksanakan tugas-tugas pelayanan masyarakat. Pemerintah pun dinilai memiliki kelemahan dalam melakukan koordinasi yang efektif. Persoalan-persoalan tersebut berakumulasi pada timbulnya *distrust* terhadap pemerintah. Tantangan terberat adalah mengubah pola pikir menjadi demokratis, berorientasi pada prinsip-prinsip *good governance*, tetap profesional, serta netral.

Peningkatan Peran Informasi dan Komunikasi

Penyediaan, pengelolaan, dan penyebarluasan informasi publik merupakan permasalahan yang masih akan dihadapi. Masyarakat tidak dapat mengakses informasi publik yang diperlukan apabila tidak didukung oleh penyediaan informasi publik yang memadai dan tepat waktu, tanpa pengelolaan informasi publik yang baik dan berkualitas (*content*), serta tanpa penyebarluasan informasi publik yang tepat sasaran.

Permasalahan lainnya adalah kesadaran masyarakat termasuk badan usaha belum sepenuhnya memahami arti penting peran strategis dari informasi yang berakibat pada masih rendahnya pemanfaatan informasi, dan konsekuensinya menyebabkan kesenjangan informasi di dalam masyarakat. Konsekuensi selanjutnya, masyarakat tanpa informasi publik yang memadai akan sulit berpartisipasi dan ikut terlibat dalam proses penyelenggaraan negara dan berperan dalam ruang publik, dan akan menghadapi kendala dalam mengawasi penyelenggaraan negara sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Permasalahan penyediaan, pengelolaan dan penyebaran informasi publik tidak terlepas dari kendala keterbatasan kapasitas sumber daya manusia bidang informasi dan komunikasi, belum memadainya regulasi di bidang komunikasi dan informasi, serta sarana dan prasarana komunikasinya. Tantangan peningkatan kualitas sumber daya manusia khususnya SDM pemerintah dan lembaga publik lainnya adalah sulitnya mengubah paradigma, pola pikir (*mind set*) yang merupakan persyaratan kunci untuk dapat mengubah sikap dan tindakan dalam bekerja untuk memberikan pelayanan informasi kepada publik dan pelaksanaan komunikasi publik secara profesional.

Peran pemerintah dalam penyediaan informasi publik perlu dipertimbangkan dan dilihat dari perspektif sebagai salah satu pemangku kepentingan yang memberikan perhatian terhadap percepatan penyebaran informasi publik dan penyediaan informasi publik yang tepat untuk mengimbangi deras arus informasi akibat globalisasi dan perkembangan pesat melalui teknologi informasi, yang ditengarai saat ini tidak seluruhnya memberikan manfaat bagi kepentingan publik. Globalisasi telah memberikan kontribusi terhadap tergerusnya nasionalisme dan nilai-nilai kebangsaan Indonesia, dan berkembangnya pola-pola konsumerisme yang kurang tepat.

Media massa yang kuat adalah prasyarat penting bagi konsolidasi demokrasi. Namun, kondisi saat ini mengindikasikan industri media yang berkembang masih

didominasi oleh kepentingan profit/industri yang dikhawatirkan mengganggu kebebasan pers di Indonesia. Tantangan bagi pemerintah untuk tetap menjamin kebebasan pers. Pemerintah harus terus mendorong antara lain melalui kebijakan untuk mewujudkan misi media massa dalam mencerdaskan bangsa dan berpihak pada kepentingan publik dan melalui pengembangan sistem komunikasi yang demokratis (netral, seimbang, dan bertanggung jawab).

Masih terkait dengan kebijakan, dengan telah ditetapkannya UU KIP, tantangan bagi semua badan publik adalah komitmen dan konsistensi untuk dapat menjalankan UU tersebut. Beberapa hal penting terkait pelaksanaan UU KIP yang harus benar-benar disiapkan, antara lain kerangka kelembagaan dan hukum, administrasi dan perangkat pendukung pelaksanaan lainnya, serta sumber daya manusianya.

Proses demokratisasi berpotensi akan mendapatkan momentum positif terus-menerus apabila komitmen seluruh pemangku kepentingan untuk saling bekerja sama mendorong proses demokratisasi ke arah yang positif dan konstruktif dijaga dan ditingkatkan secara berkelanjutan. Namun, kenyataannya upaya untuk mendorong komitmen terkendala oleh masih lemahnya koordinasi, komunikasi dan dialog dalam pemerintah dan antara pemerintah dan masyarakat. Dengan demikian, menjadi pekerjaan rumah yang tidak ringan bagi pemerintah untuk menciptakan prakarsa secara terus menerus untuk membangun secara sistematis dan menguatkan mekanisme komunikasi dialog, dan koordinasi, tidak saja dengan sesama instansi pemerintah, dan antara pemerintah dengan penyelenggara negara lainnya, tetapi juga antara pemerintah dengan masyarakat sipil, politik dan ekonomi secara intensif dan berkualitas.

6.1.2.2 Sasaran

Sasaran pembangunan bidang politik dalam negeri adalah meningkatnya kualitas demokrasi yang ditandai dengan angka indeks demokrasi Indonesia rata-rata 73 pada akhir tahun 2014 dan tingkat partisipasi politik rakyat rata-rata 75%. Meningkatnya kualitas demokrasi tersebut dapat dilihat melalui hal-hal berikut.

1. Semakin terjaminnya peningkatan iklim politik kondusif bagi berkembangnya kualitas kebebasan sipil dan hak-hak politik rakyat yang semakin seimbang dengan peningkatan kepatuhan terhadap pranata hukum. Hal ini ditandai dengan peningkatan indeks rata-rata dari 64,3¹ pada tahun 2010 menjadi 75 pada akhir tahun 2014.
2. Meningkatnya akuntabilitas lembaga demokrasi termasuk di dalamnya terwujudnya akuntabilitas peran masyarakat sipil dan organisasi masyarakat sipil, peran parpol, dan peran lembaga legislatif. Lembaga-lembaga demokrasi tersebut diharapkan dapat menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan

¹ Menggunakan angka Indeks Demokrasi Indonesia tahun 2007 (Bappenas)

amanat Konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan sesuai dengan keinginan dan tuntutan rakyat. Pada akhir tahun 2014, capaian sasaran ini akan ditandai dengan indeks kinerja institusi demokrasi rata-rata 70, naik dari indeks rata-rata sebesar 52,3 pada tahun 2010².

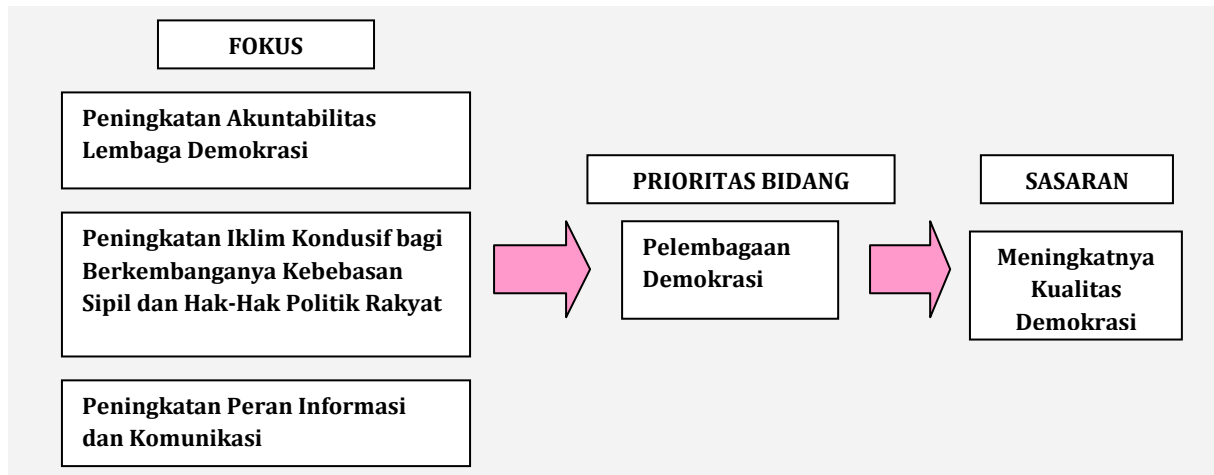
3. Terlaksananya Pemilu 2014 yang adil dan demokratis, yang ditunjukkan dengan meningkatnya partisipasi politik rakyat mencapai rata-rata 75 %, dan berkurangnya diskriminasi yang terkait dengan pemenuhan hak untuk memilih dan dipilih. Tingkat partisipasi politik tahun 2010 adalah sebesar 70,99% untuk Pemilu Presiden dan 72,56% untuk Pemilu Legislatif.
4. Meningkatnya peran informasi dan komunikasi, yang ditandai dengan meningkatnya kualitas layanan informasi dan komunikasi pemerintah.

6.1.3 Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan

Untuk mencapai sasaran pembangunan bidang politik dalam negeri dan komunikasi, prioritas bidang politik adalah pelebagaan demokrasi dengan fokus prioritas: (1) peningkatan akuntabilitas lembaga demokrasi; (2) peningkatan iklim kondusif bagi berkembangnya kebebasan sipil dan hak politik rakyat dan berkembangnya demokrasi; (3) peningkatan peran informasi dan komunikasi. Berdasarkan prioritas bidang dan fokus prioritas tersebut, kerangka pikir dari RPJMN 2010-2014 Subbidang Politik Dalam Negeri dan Komunikasi dapat digambarkan sebagai berikut:

² Menggunakan Indeks Demokrasi Indonesia tahun 2007 (Bappenas)

BAGAN 6.1 KERANGKA BERPIKIR SUBBIDANG POLITIK DALAM NEGERI



Berpijak pada kerangka pikir di atas, akan ditempuh arah kebijakan mencakup strategi sebagai berikut di bawah ini:

1. **Meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas lembaga-lembaga demokrasi,** yang dilakukan melalui:
 - a. **Fasilitasi program penguatan organisasi masyarakat sipil (OMS) dan partai politik**

Penguatan OMS perlu ditekankan pada peningkatan manajemen, peningkatan kualitas SDM, proses pengaderan, pengembangan jaringan dan penggalangan dana operasional organisasi yang dapat menjamin keberlanjutan OMS. Dalam melaksanakan penguatan kapasitasnya, OMS dapat diberikan fasilitasi peningkatan kapasitas secara langsung dalam bentuk kegiatan pelatihan dan bentuk-bentuk lain yang inovatif dan tepat, dan juga dapat diberikan pembelajaran secara langsung dengan melakukan kegiatan langsung di masyarakat (*learning by doing*) untuk mempraktikkan manajemen pengelolaan kegiatan di dalam masyarakat. *Best practices* dari OMS yang berhasil baik pada tingkat nasional maupun daerah bahkan dunia perlu didistribusikan secara meluas secara reguler untuk dorongan semangat dan prestasi serta perbaikan kapasitas organisasi.

Partai politik perlu diperkuat agar dapat melaksanakan fungsinya mewakili ekspresi politik dan pilihan, membangun kompetisi kepemiluan dan dialog politik, mewakili agregasi dan artikulasi kepentingan sosial, menyiapkan sosialisasi politik, dan mempersiapkan pemilihan kepemimpinan dan tata kelola.

b. Perbaikan peraturan perundangan di bidang politik dan perumusan kebijakan pemerintah

UU No. 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan perlu direvisi agar dapat mengakomodasi perkembangan demokrasi yang sedang berlangsung. Rencana revisi terhadap UU tersebut telah dimasukkan ke dalam Prolegnas sejak tahun 1999 dan tidak pernah berhasil untuk diselesaikan. Untuk itu, diperlukan upaya fasilitasi untuk mendorong revisi UU tersebut melalui berbagai dialog dengan berbagai pemangku kepentingan terutama dengan kalangan OMS agar dalam 5 tahun ke depan revisi tersebut dapat diselesaikan. Di samping itu, revisi perlu dilakukan terhadap UU Parpol untuk lebih dapat meningkatkan kualitas parpol dalam peningkatan kualitas demokrasi di Indonesia. Kajian perlu dilakukan juga terhadap PP tentang partai lokal di Aceh untuk mendapatkan masukan perbaikan PP-nya. Bantuan keuangan parpol perlu juga dievaluasi untuk memberikan masukan perbaikan untuk penyusunan PP Bantuan Keuangan Parpol yang akan dilaksanakan untuk periode 5 tahun selanjutnya.

c. Dukungan bagi keberlanjutan peran OMS dalam proses demokratisasi.

Pengembangan *democracy trust fund* diperlukan untuk menjamin keberlanjutan organisasi masyarakat sipil sebagai jalur terhadap sumber pendanaan yang diperlukan bagi operasionalisasi OMS. Untuk mendukung pengembangan *trust fund* tersebut, fasilitasi pengkajian perlu dilakukan terhadap beberapa peraturan perundangan-undangan seperti evaluasi UU No. 9 Tahun 1961, tentang Pengumpulan Uang dan Barang dan fasilitasi forum untuk memberi masukan terhadap penyusunan naskah akademis dan draf RPP Insentif Perpajakan.

Keberlanjutan OMS perlu didukung oleh seluruh pemangku kepentingan di daerah. Untuk itu, fasilitas terhadap pemerintah daerah perlu dilakukan untuk membantu peningkatan peran dan kapasitas forum publik yang melibatkan OMS di daerah. Proses konsolidasi demokrasi memerlukan dukungan seluruh pemangku kepentingan, baik di pusat maupun di daerah. Khusus terkait dengan forum publik FKUB, peningkatan kapasitas perlu dilakukan agar dapat melaksanakan perannya secara efektif.

d. Fasilitasi program penyiapan dan penyelenggaraan pemilu 2014

Pelembagaan proses pemilu harus dimulai sedini mungkin agar tidak menghadapi kendala waktu yang terbatas. Penyiapan penyusunan rancangan peraturan KPU yang diperlukan, tata cara advokasi hukum dan penyuluhannya bagi penyelenggara pemilu akan mendorong penyiapan penyelenggaraan pemilu secara lebih profesional dan tepat waktu. Peta logistik pemilu dan mekanisme distribusi logistik, serta komunikasi KPU dengan KPU provinsi/kab/kota perlu diperbaiki sejak dini dan



diperbaharui terus-menerus untuk dapat lebih meningkatkan sasaran distribusi logistik tepat lokasi dan tepat waktu meningkatkan koordinasi. Pemutakhiran data pemilih merupakan keniscayaan yang perlu dilakukan secara teratur dan dapat dimanfaatkan tidak saja pada pemilu untuk 2014 mendatang, tetapi juga untuk keperluan pemilu kepala daerah. Perlu dirumuskan metode pemutakhiran yang efektif dan efisien, dan alur komunikasi dan koordinasi antara KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten dan KPU Kota agar pemutakhiran berjalan dengan baik dan menghasilkan data yang akurat. Teknologi informasi perlu menjadi pilihan untuk mendukung pemutakhiran data.

2. **Menjaga dan menciptakan iklim kondusif yang menjamin kebebasan sipil dan penghormatan terhadap hak-hak politik rakyat dan perkembangan demokrasi di Indonesia** yang dilakukan melalui langkah-langkah antara lain sebagai berikut:
 - a. **Fasilitasi perbaikan dan penyusunan peraturan perundangan** bidang politik, dan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan fasilitasi pembahasan UU Penanganan Konflik. Perbaikan terhadap peraturan perundang-undangan tersebut ditujukan untuk memperbaiki kelemahan yang dialami dalam 5 tahun terakhir dan merespons wacana publik yang menghendaki proses demokrasi berjalan dengan baik. Kajian perlu dilaksanakan terlebih dahulu sebelum melakukan perbaikan terhadap peraturan perundangan-undangan dimaksud agar keputusan yang diambil benar-benar memberikan manfaat positif terhadap perkembangan demokrasi dan masyarakat. Revisi UU No. 32 Tahun 2004 akan perlu dilakukan terbatas untuk meningkatkan efisiensi pelaksanaan pemilu kepala daerah. Sementara itu, UU Penanganan Konflik akan bermanfaat untuk dapat menyelesaikan konflik dengan cepat dan tepat dan melakukan pencegahan secara dini.
 - b. **Pelaksanaan pendidikan politik**, termasuk di dalamnya pendidikan pemilih, pendidikan politik demokratis, serta pendidikan kewarganegaraan dan pengembangan budaya dan etika politik demokrasi yang berdasarkan empat pilar bangsa. Perlu menjadi pembelajaran ke depan adalah bahwa penanganan dengan cara-cara kekerasan, tidak demokratis, dan tanpa menghargai hak asasi manusia jelas terbukti menyebabkan ketidakharmonisan di dalam masyarakat dan berlarutnya persoalan. Sementara itu, penanganan tanpa kekerasan lebih memudahkan penyelesaian masalah, dan tentunya membawa harmoni dalam masyarakat. Pendidikan perdamaian perlu menjadi bagian kurikulum yang diajarkan dalam pendidikan politik dan kebangsaan. Di samping itu, pendidikan untuk aparat pemerintah di daerah perlu mendapatkan prioritas mengingat

posisi dan fungsinya yang lebih dekat untuk melayani masyarakat di daerah.

- c. **Peningkatan peran perempuan melalui pendidikan politik.** Pendidikan politik perlu dilaksanakan secara lebih intensif untuk mengimbangi paradigma yang tidak menguntungkan bagi pihak perempuan. Pendidikan politik perlu memiliki strategi jitu untuk mengikis permasalahan yang dihadapi akses partisipasi perempuan dalam politik. Kebijakan dan fasilitasi terus-menerus merupakan kunci keberhasilan pencapaian kuota 30% perempuan dalam lembaga penyelenggara negara dan lembaga politik, dan peran-peran lainnya yang seharusnya mensyaratkan keterlibatan perempuan.
- d. **Pengembangan pusat pendidikan politik dan kebangsaan,** termasuk di dalamnya pendidikan politik dan pendidikan pemilih, partisipasi politik rakyat, dan pusat pendidikan kebangsaan sebagai wadah pembelajaran dan dihasilkannya metode dan pendekatan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam berdemokrasi serta berbangsa. Pusat pendidikan diperlukan untuk menjaga agar pendidikan dapat terus dilakukan secara bersinambungan tanpa henti dan menghasilkan inovasi-inovasi baru yang tepat dalam meningkatkan proses pendidikan untuk masyarakat. Pendidikan yang terus-menerus diperlukan untuk mengimbangi pengikisan terhadap nasionalisme dan kebangsaan Indonesia. Perlu adanya kerja sama dan memanfaatkan sekolah-sekolah demokrasi dan kebangsaan yang telah ada di seluruh Indonesia untuk mengoptimalkan fungsi pendidikan politik dan kebangsaan di tanah air.
- e. **Pengembangan kerja sama dengan organisasi masyarakat sipil** untuk melaksanakan pendidikan politik, pendidikan pemilih dan pendidikan kewarganegaraan dan melaksanakan diskusi untuk memberikan masukan perumusan kebijakan publik. Fasilitasi, koordinasi, penguatan lembaga yang akan melaksanakan kerja sama, penguatan hubungan dengan pemerintah daerah, serta penguatan proses pemantauan merupakan kunci keberhasilan program kerja sama dimaksud.
- f. **Penguatan dan pelembagaan forum dialog masyarakat dalam mendukung proses demokratisasi dan penyelesaian konflik.** Masyarakat sendirilah yang tahu persis permasalahan sehingga perlu didukung oleh adanya forum dialog yang efektif dan peningkatan kapasitasnya agar dapat mengelola konflik dalam masyarakat. Pemerintah perlu melakukan kerja sama pula dengan OMS yang berkecimpung dalam penanganan konflik untuk mendorong masyarakat sipil di daerah melakukan pengelolaan konflik dengan efektif.

Konsolidasi demokrasi memerlukan dukungan tidak hanya pemerintah di pusat, tetapi harus didukung oleh pemerintahan daerah dan pemangku kepentingan di daerah. Kelompok Kerja Demokrasi Provinsi sebagai forum *multistakeholder* perlu diperkuat sebagai wadah untuk membantu perumusan kebijakan publik pemajuan demokrasi dan melakukan penilaian perkembangan demokrasi di daerah provinsi masing-masing. Kedua fungsi kelompok kerja demokrasi tersebut akan membantu pemerintah daerah dalam merumuskan agenda pembangunan politik untuk memperbaiki kinerja demokrasi di daerah.

- g. **Fasilitasi penyusunan mekanisme penyusunan kebijakan publik** untuk menyalurkan dan menguatkan interaksi dan komunikasi yang lebih intensif antara para pembuat kebijakan dan masyarakat sipil agar kebijakan yang dibuat memiliki relevansi dengan kebutuhan nyata masyarakat dan dapat menyelesaikan persoalan di dalam masyarakat;

3. Meningkatkan peran informasi dan komunikasi yang dilakukan melalui.

a. **Pengelolaan, penyebaran, dan pemerataan informasi publik**

Pengelolaan, penyebaran, dan pemerataan informasi publik merupakan salah satu respons yang diberikan oleh pemerintah dan lembaga publik lainnya terhadap pelaksanaan UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Dalam hal lain, pemerintah perlu untuk menyediakan informasi publik yang memadai ditujukan untuk menjadi penyeimbang informasi global. Peran portal Indonesia, media centre, dan media lainnya akan menjadi suatu keniscayaan yang perlu ditingkatkan terutama dari sisi konten informasi publik. Dalam mengimbangi derasnya arus globalisasi yang didukung teknologi informasi yang semakin andal, penyediaan, pengelolaan informasi publik dan terutama penyebarannya perlu memanfaatkan pula teknologi informasi yang andal yang telah dibangun dan dimiliki oleh bangsa Indonesia. Pembangunan infrastruktur teknologi informasi yang telah dilakukan selama ini telah dapat menjangkau seluruh wilayah Indonesia. Penyediaan konten informasi yang memadai dan tepat akan menjadi roh dan mendorong peningkatan efektivitas keberadaan infrastruktur tersebut untuk mendorong terwujudnya masyarakat informasi Indonesia.

Pengelolaan, penyebaran, dan pemerataan informasi publik akan sulit berjalan efektif apabila masyarakat sendiri tidak didorong untuk memanfaatkan informasi publik yang telah tersedia. Untuk itu, kegiatan penyebaran dan pemerataan informasi perlu memperhatikan upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya informasi dan pemanfaatan informasi. Regulasi perlu dirumuskan untuk mendorong pemanfaatan informasi oleh masyarakat.

b. Pemberdayaan masyarakat dan pengembangan kemitraan dalam penyebaran informasi publik

Tidaklah memungkinkan bagi pemangku kepentingan terutama pemerintah untuk menyebarkan informasi tanpa mitra. Pelayanan informasi publik memerlukan keterlibatan tidak hanya lembaga pemerintah tetapi juga lembaga penyiaran (publik dan swasta), dan lembaga kemasyarakatan yang bergerak dalam bidang komunikasi dan informasi. Pemanfaatan lembaga kemasyarakatan termasuk media tradisional, media komunitas, dan media kemasyarakatan lainnya akan membantu penyebaran informasi yang tepat dan cepat. Kerja sama dengan pemerintah daerah dan lembaga-lembaga kemasyarakatan di daerah merupakan keniscayaan untuk menciptakan jembatan komunikasi yang efektif dan efisien dengan masyarakat di daerah.

c. Penyediaan dan peningkatan SDM bidang informasi dan komunikasi

Sumber daya manusia bidang informasi dan komunikasi merupakan agen penyedia, pengelolaan, penyebaran informasi publik. Untuk mendukung hal tersebut beberapa kegiatan yang akan dilakukan adalah pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, pemberian beasiswa, dan peningkatan standar kompetensi kerja bidang informasi dan komunikasi.

Efektivitas pelaksanaan UU KIP sangat ditentukan pula oleh kualitas SDMnya. Untuk itu, pendidikan dan pelatihan terkait *Chief Information Officer* (CIO) dan budaya pendokumentasian menjadi tekanan utama.

6.2. Sub Bidang Politik Luar Negeri

Selama periode 2005–2009, perjalanan politik luar negeri Indonesia diarahkan pada upaya memperkuat dan memperluas pemahaman tentang identitas nasional sebagai negara demokratis dalam tatanan masyarakat internasional. Proses demokratisasi yang sedang berjalan di Indonesia secara konsisten telah mengundang banyak simpati, dukungan, dan kepercayaan internasional sehingga Blok GNB dapat menjadi modal penting bagi diplomasi internasional Indonesia. Di sisi lain, Indonesia yang merupakan negara dengan penduduk mayoritas muslim menunjukkan fakta bahwa demokrasi dan agama dapat berpadu dan saling bersinergi dengan gagasan ekonomi modern yang terbuka. Hal ini merupakan modal dasar yang sangat penting pula dalam diplomasi internasional Indonesia.

Selama ini politik luar negeri yang didasarkan pada prinsip bebas dan aktif, yang merupakan modal Indonesia, telah terbukti memberikan peluang dalam membangun hubungan baik dengan negara-negara di dunia dan meningkatkan peranan Indonesia yang menonjol dalam berbagai organisasi regional dan internasional, terutama dalam PBB, ASEAN, APEC, ARF, Gerakan Non-Blok dan Organisasi Konferensi Islam (OKI).



Politik luar negeri Indonesia telah dijalankan dengan perpaduan antara pendekatan *concentric circle* yang berbasis pada penataan hubungan bilateral berdasarkan pertimbangan-konsideran regional dengan pendekatan isu strategis yang bersifat lintas kawasan. *Multi directions foreign policy* yang dijalankan pada tataran praktis dengan memajukan hubungan baik dengan negara-negara berkembang maupun dengan negara-negara maju memungkinkan kiprah politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif berlangsung relatif sangat lapang dan efektif. Dalam pelaksanaan politik luar negerinya, Indonesia memegang komitmen '*A Million Friends, Zero Enemy*'.

6.2.1 Kondisi Umum

Uraian mengenai kondisi yang telah dicapai hingga saat ini oleh Indonesia dapat digambarkan sebagai berikut di bawah ini.

Peran dan Kepemimpinan Indonesia dalam ASEAN Khususnya dalam Implementasi Piagam ASEAN dan Pembentukan Komunitas ASEAN 2015

Kepemimpinan Indonesia di ASEAN, sebagai bagian dari strategi memperkuat lingkaran pertama kebijakan politik luar negeri, tercermin pada keberhasilannya menuangkan gagasan untuk membentuk komunitas ASEAN yang terdiri dari 3 (tiga) pilar, yaitu komunitas politik-keamanan ASEAN, komunitas ekonomi ASEAN, dan komunitas sosial budaya ASEAN. Komunitas ASEAN yang ingin dicapai pada tahun 2015 tersebut bertujuan untuk mewujudkan perdamaian, stabilitas dan kesejahteraan di antara negara-negara di kawasan Asia Tenggara.

Pada awal tahun 2009 KTT ASEAN ke-14 di Hua Hin Thailand telah menghasilkan *Cha-am Hua Hin Declaration on the Roadmap for an ASEAN 2009—2015* yang meliputi Cetak Biru Komunitas Politik Keamanan ASEAN (*ASEAN Political-Security Community Blueprint/APSC Blueprint*), Cetak Biru Komunitas Ekonomi ASEAN (*ASEAN Economic Community Blueprint/AEC Blueprint*), Cetak Biru Komunitas Sosial Budaya ASEAN (*ASEAN Socio-Cultural Community Blueprint/ASCC Blueprint*), dan *Initiative for ASEAN Integration Work Plan 2* untuk tahun 2009-2015, sebagai pengganti *Vientiane Action Programme*. Indonesia berhasil mendorong ASEAN menjadi organisasi regional yang mampu menarik negara-negara utama di dunia untuk menjadi bagian dari proses integrasi ASEAN. Cetak Biru memuat program aksi (*action line*) yang perlu dilaksanakan dalam rangka mewujudkan suatu komunitas ASEAN.

Cetak Biru Komunitas Sosial Budaya ASEAN memuat 348 rencana aksi, dan dimaksudkan sebagai panduan bagi negara anggota ASEAN dalam persiapan menyongsong Komunitas Sosial Budaya ASEAN tahun 2015, melalui penguatan integrasi ASEAN yang berpusat pada masyarakat (*people-centered*) serta memperkuat kesadaran dan rasa kepemilikan masyarakat (*We Feeling*) terhadap ASEAN. Salah satu implementasi dari *APSC Blueprint* adalah ditandatanganinya *ASEAN Framework Agreement on Visa Exemption* yang

telah diratifikasi Indonesia pada tanggal 22 Mei 2009. Di samping itu, Indonesia juga mengajukan proposal proyek pelaksanaan *Regional Seminar on ASEAN Security Outlook* sebagai bagian dari implementasi *APSC Blueprint*. Proposal tersebut kemudian disetujui oleh Pemerintah Jepang melalui *Japan ASEAN Integration Fund (JAIF)* untuk dapat dilaksanakan pada paruh pertama tahun 2010.

Indonesia merupakan pendorong utama terbentuknya *ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights* dan pembentukan mekanisme HAM ASEAN. Kepentingan Indonesia terefleksikan di dalam Cetak Biru Politik Keamanan, beberapa di antaranya adalah penegasan pentingnya pemajuan prinsip-prinsip demokrasi, pemajuan perlindungan HAM, serta pemajuan keamanan dan stabilitas kawasan. Sebagai salah satu implementasi aspek hukum Piagam ASEAN, telah dilakukan pembentukan mekanisme penyelesaian sengketa ASEAN.

Berkenaan dengan ketahanan pangan di kawasan, sesuai dengan inisiatif dan konsep yang diusulkan Indonesia, ASEAN telah mengesahkan *ASEAN Integrated Food Security Framework (AIFS)* dan *Strategic Plan of Action on Food Security in the ASEAN Region (SPA-FS)*. Kedua bentuk kerja sama tersebut dilaksanakan melalui berbagai pendekatan pragmatis di antaranya peningkatan produksi pangan, pengurangan resiko kegagalan panen, dan pengembangan iklim pasar yang kondusif bagi produk-produk pertanian. Dalam kerangka ASEAN+3 juga telah dicapai kesepakatan untuk meningkatkan status *East Asia Emergency Rice Reserve (EAERR)* dari *pilot project* menjadi suatu kerja sama permanen bernama *ASEAN Plus Three Emergency Rice Reserve (APTERR)*. Indonesia aktif ikut serta dalam setiap forum dalam kerangka ASEAN. Melalui kerangka *ASEAN Regional Forum (ARF)*, negara-negara di ASEAN termasuk Indonesia memiliki forum konsultasi dan dialog yang konstruktif di bidang politik dan keamanan untuk membangun dan memperkuat rasa saling percaya di antara negara-negara peserta (*confidence building measures/CBM*), serta mencegah atau meminimalisasi terjadinya konflik melalui diplomasi preventif (*preventive diplomacy*). Mantapnya stabilitas keamanan kawasan yang menjadi kepentingan semua negara menjadi salah satu elemen kunci bagi kesinambungan pembangunan nasional dan peningkatan kesejahteraan. Lebih lanjut, ARF membahas pula upaya penanggulangan kejahatan lintas negara melalui *working group* khusus membahas kejahatan lintas negara di kawasan. Dalam konteks pemberantasan terorisme, di bawah kepemimpinan Indonesia, *Working Group on Counter Terrorism* berhasil memfinalisasi *ASEAN Comprehensive Plan of Action on Counter Terrorism (ACPoA on CT)*, yang diharapkan dapat mendorong negara-negara anggota untuk segera meratifikasi *ASEAN Convention on Counter Terrorism (ACCT)*.

Peran Indonesia dalam Menjaga Keamanan Nasional dan Menciptakan Perdamaian Dunia

Dalam kerangka penguatan kerja sama di kawasan, Indonesia terus membangun struktur-struktur kerja sama bilateral dengan kawasan Pasifik Selatan, yang memiliki arti strategis tersendiri bagi Indonesia, terutama dalam hal dukungan bagi keutuhan



NKRI. Negara-negara di kawasan Pasifik Selatan yang menyatakan dukungan terhadap integritas dan kedaulatan wilayah NKRI antara lain adalah Papua New Guinea, Solomon Islands, Fiji, Samoa dan Tonga.

Peningkatan kerja sama dengan negara-negara di lingkungan Pasifik sejalan dengan kebijakan Indonesia untuk menerapkan *Look East Policy* sejak awal dekade ini. Kebijakan tersebut ditujukan bagi penegasan identitas kebhinekaan bangsa Indonesia dan untuk memagari potensi disintegrasi bangsa. Kebijakan *Look East Policy* RI sejalan dengan kebijakan *Look North Policy* yang saat ini cenderung diterapkan oleh negara-negara di Pasifik Selatan untuk lebih mendekatkan diri dengan negara-negara di Asia termasuk Indonesia.

Pergeseran kebijakan negara-negara Pasifik untuk lebih mendekatkan diri dengan Indonesia dikarenakan adanya dukungan Indonesia terhadap 4 (empat) pilar pembangunan Pasifik, antara lain *economic growth* dan *sustainable development*. Komitmen Indonesia dalam mendukung implementasi *Pacific Plan* terlihat dari pemberian pelatihan dalam kerangka *Capacity Building* sebagai bagian dari *soft power* dan instrumen penting diplomasi Indonesia.

Indonesia secara khusus juga membangun dialog dan kerja sama dengan negara-negara di kawasan Timur seperti *Tripartite Dialogue* dengan Australia dan Timor Leste. Pada tanggal 12 November 2008 di Canberra, Indonesia dan Australia telah menandatangani rencana aksi kerja sama keamanan dari *Lombok Treaty*. Selain itu, kerja sama pencegahan kejahatan transnasional dan *people to people contact* juga semakin meningkat.

Indonesia berperan sebagai Ketua *Peace Committee* untuk membantu menyelesaikan masalah Filipina Selatan dan membantu penyelesaian separatisme di Thailand Selatan. Di kawasan Laut China Selatan, Indonesia memandang penting penanganan konflik di kawasan tersebut mengingat Laut China Selatan merupakan pintu terdepan Indonesia dari wilayah barat laut, dan jalur transportasi laut bagi Indonesia dan Asia Timur. Gangguan yang muncul akan berpengaruh terhadap kondisi ekonomi dan keamanan di wilayah NKRI. Indonesia memandang penting untuk mengelola potensi konflik di Laut China Selatan menjadi kerja sama yang saling menguntungkan terutama bagi negara-negara yang terlibat klaim di dalamnya. Untuk itu, Indonesia selama 20 tahun terakhir telah mengorganisasikan penyelenggaraan *International Workshop on South China Sea* yang tidak dapat dimungkiri telah dapat menurunkan potensi konflik, serta mampu mendorong serangkaian kerja sama pemanfaatan sumber daya di Laut China Selatan dan melahirkan *Declaration of Conduct* yang dibahas di forum ASEAN+China. Dalam isu nuklir di Semenanjung Korea, Indonesia mendesak Korea Utara untuk melakukan dialog dalam *Six Party Talks*. Indonesia menyatakan sikap tidak setuju uji coba nuklir bawah tanah oleh Korea Utara yang bertentangan dengan dengan norma-norma dalam *Non-Proliferation Treaty* (NPT) dan *Comprehensive Test Ban Treaty* (CTBT). Indonesia menilai bahwa penyelesaian masalah

Semenanjung Korea harus dilakukan secara komprehensif antara lain dengan denuklirisasi serta normalisasi hubungan antara Korea Selatan dan Korea Utara.

Indonesia aktif dalam berbagai upaya internasional dalam melakukan pengaturan senjata pemusnah massal dan senjata konvensional, seperti senjata ringan dan kaliber kecil (*small arms and light weapons*), ranjau darat anti-personel (*anti-personnel landmines*), serta *cluster munitions*. Terkait dengan senjata pemusnah massal, Indonesia selalu memegang prinsip bahwa upaya untuk mengatasi ancaman penyebaran senjata pemusnah massal tersebut hendaknya tidak menghambat hak seluruh negara, khususnya negara berkembang, dalam melakukan pengembangan bahan-bahan nuklir, kimia maupun biologi untuk tujuan damai.

Berkenaan dengan senjata konvensional, Indonesia menekankan pentingnya upaya multilateral untuk memerangi perdagangan gelap senjata ringan dan kaliber kecil yang merupakan jenis senjata yang paling banyak digunakan oleh masyarakat umum dalam konflik di berbagai belahan dunia.

Dalam menjaga dan menciptakan perdamaian dunia, peran Indonesia semakin nyata dengan berhasilnya Indonesia mempertahankan posisinya sebagai negara yang peka terhadap nilai-nilai keadilan dan kebebasan di dalam hubungan internasional. Pada saat menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB, Indonesia berani berbeda pendapat dengan negara-negara besar di PBB dalam kasus Program Nuklir Iran. Indonesia senantiasa menyandarkan posisinya pada laporan *International Atomic Energy Agency* (IAEA), lembaga internasional yang berkompeten untuk menilai kepatuhan Iran dalam hal pengembangan energi nuklir. Ketika laporan IAEA memastikan bahwa Iran tidak cukup bekerja sama dan tidak transparan dalam pengembangan teknologi nuklirnya, Indonesia mendukung resolusi 1747/2007. Namun, ketika laporan IAEA menampilkan Iran cukup bekerja sama dan lebih transparan, Indonesia memilih posisi *abstain* (satu-satunya dari 15 anggota) dalam *voting* untuk Resolusi 1803/2008. Selain itu, Indonesia senantiasa mengedepankan cara penyelesaian dengan mengutamakan dialog dan negosiasi, bukan dengan penggunaan kekerasan. Dalam proses perancangan resolusi lainnya pada bulan September 2008 (Resolusi 1835/2008), Indonesia telah berhasil mengamandemen rancangan resolusi yang notabene sudah didukung oleh 5 anggota tetap DK PBB untuk memastikan resolusi juga mengedepankan upaya dialog.

Dalam masa keanggotaan Indonesia pada DK-PBB (2007—2008), Indonesia senantiasa memastikan kepatuhannya terhadap prinsip-prinsip internasional yang bersifat fundamental, terutama prinsip penghormatan terhadap kedaulatan dan keutuhan wilayah nasional (*national sovereignty and territorial integrity*). Indonesia senantiasa konsisten menolak pelepasan bagian wilayah suatu negara secara sepihak seperti Kosovo dan Ossetia Selatan, sebagai suatu preseden yang dapat mengganggu stabilitas hubungan antarnegara.

Dalam kaitannya dengan konflik di Timur Tengah, Indonesia secara konsisten



terus mendukung perjuangan bangsa Palestina berdasarkan resolusi DK PBB No. 242 (1967) dan No. 338 (1973). Resolusi tersebut menyebutkan pengembalian tanpa syarat semua wilayah Arab yang diduduki Israel dan pengakuan atas hak-hak sah rakyat Palestina untuk menentukan nasibnya sendiri, serta mendirikan negara di atas tanah airnya sendiri dengan Jerusalem Timur sebagai ibukotanya, di bawah prinsip “*land for peace*”. Tidak terlepas dari kontribusi yang diberikan oleh pemerintah Indonesia, pada Desember 2008, untuk pertama kalinya sejak tahun 2004, DK PBB telah mengesahkan Resolusi No. 1850 mengenai proses perdamaian di Timur Tengah khususnya Israel dan Palestina.

Indonesia dalam kapasitasnya sebagai anggota Majelis Umum PBB menjadi salah satu penggagas utama dilaksanakannya Sidang Khusus Majelis Umum PBB pada tanggal 15—16 Januari 2009 mengenai isu Palestina. Sidang tersebut melahirkan Resolusi No. A/RES/ES-10/18 yang berisi dukungan bagi implementasi Resolusi Dewan Keamanan PBB 1860, serta seruan kepada masyarakat internasional untuk membantu krisis kemanusiaan di Jalur Gaza. Selain itu, Indonesia telah mendorong dilaksanakannya *Special Session* Dewan HAM dan telah dihasilkannya resolusi *The Grave Violation of Human Rights in the Occupied Palestinian Territory Particularly Due to the Recent Israeli Military Attacks against Occupied Gaza Strips* melalui pemungutan suara. Hal lain, masing-masing pada bulan Juni dan Mei 2009, Indonesia menjadi tuan rumah penyelenggaraan *United Nations Forum of Civil Society in Support of the Palestinian People* dan *United Nations Asian and Pacific Meeting on the Question of Palestine* dalam rangka memperkuat konsensus internasional mencari solusi konflik Israel dan Palestina. Kedua forum tersebut merupakan agenda Komite Palestina PBB dalam rangka menggali dukungan masyarakat internasional dalam penyelesaian damai konflik Israel dan Palestina.

Dengan adanya serangan Israel ke Palestina di penghujung tahun 2008, Indonesia melalui Biro Koordinasi GNB di New York telah mengambil inisiatif agar Majelis Umum PBB mengadakan sidang darurat atas dasar pasal 51 Piagam PBB mengenai *Uniting for Peace Resolution*. Pemerintah Indonesia merespon serangan tersebut dengan menyampaikan surat kepada Sekjen PBB dan Presiden Dewan Keamanan PBB yang pada prinsipnya mengecam keras dan meminta Israel melalui PBB untuk segera menghentikan serangan Israel di jalur Gaza dan mendesak DK PBB agar mengeluarkan resolusi untuk menghentikan aksi Israel tersebut. Untuk bantuan kemanusiaan kepada rakyat dan bangsa Palestina, pemerintah Indonesia memberikan bantuan obat-obatan, dan dana sejumlah USD 1 juta. Apresiasi diberikan dari berbagai pihak, termasuk Asia Timur. Dalam serangkaian pertemuan dengan utusan khusus Jepang untuk proses Perdamaian Timur Tengah, Jepang mengundang Indonesia untuk menggali dukungan bagi proses perdamaian Palestina-Israel dengan melibatkan negara-negara Asia.

Selama tahun 2009, Indonesia telah mengerahkan 1623 personil di 6 Misi Perdamaian PBB. Dengan demikian, Indonesia saat ini menempati urutan ke-17 dalam peringkat negara-

negara kontributor OPP PBB (*Troops Contributing Countries/TCC* dan *Police Contributing Countries/PCC*). Untuk pertama kali pula Indonesia berpartisipasi dalam *Maritime Task Force (MTF)* PBB dengan mengirimkan KRI *Diponegoro* beserta jumlah personel 100 orang ke MTF UNIFIL Lebanon. Sementara itu, Indonesia juga mengirimkan personel polisi untuk bergabung dengan *United Nations African Union Mission in Darfur (UNAMID)* di Darfur, Sudan.

Di Lebanon, atas permintaan PBB, pemerintah Indonesia telah mengirimkan kontingen Garuda XXIII-A pada tahun 2006 sampai dengan Garuda XXIII-C pada tahun 2009, serta *Force Protection Company* dan *Force HQ Support Unit* (Konga XXVI-A), *Military Police Task Force* (Konga XXV-A), dan satu korvet KRI *Diponegoro* untuk bergabung dalam UNIFIL. Partisipasi Indonesia terus berlanjut di bawah resolusi DK PBB No. 1884 pada tahun 2009 yang memperpanjang mandat UNIFIL hingga akhir tahun 2010. Peningkatan partisipasi Indonesia dalam operasi pemeliharaan perdamaian didukung dengan pembentukan Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian (PMPP) sebagai forum koordinasi dan kerja sama antarinstansi terkait.

Sejak tahun 2005 Indonesia juga mengirim 20 perwira menengah TNI pada misi *United Nations Mission in Sudan (UNMIS)* di Sudan Selatan sebagai *military observers* dan satu FPU (*Formed Police Unit*) POLRI ke Darfur, Sudan untuk bergabung dalam *United Nations - African Union Mission in Darfur (UNAMID)* pada bulan Oktober 2008. Presiden Sudan secara lisan telah meminta penambahan personel FPU Indonesia pada misi UNAMID. Saat ini Indonesia masih menunggu permintaan resmi pemerintah Sudan dan persetujuan *United Nations-Department of Peace Keeping Operation (UNDPKO)*. Dalam menjalankan tugasnya, pasukan penjaga perdamaian Indonesia mendapat banyak apresiasi dari negara-negara yang sedang berkonflik karena pasukan Indonesia dipandang lebih netral dibandingkan pasukan dari negara lain. Pandangan ini membuat Indonesia menerima banyak permintaan untuk memperpanjang masa tugas pasukan perdamaiannya atau untuk datang ke negara yang baru saja berkonflik. Keanggotaan tidak tetap Indonesia di DK PBB pada tahun 2007—2008 dan perannya pada OPP PBB merupakan “*political investment*” dalam rangka memulihkan kepercayaan masyarakat internasional terhadap Indonesia dan sebagai kontribusi Indonesia dalam menyerukan dan mewujudkan perdamaian dunia.

Khusus berkaitan keikutsertaan Indonesia pada berbagai Misi Perdamaian PBB, Indonesia akan terus meningkatkan partisipasi tersebut didukung dengan peran Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian (PMPP) di dalam negeri. PMPP tersebut juga diharapkan akan menjadi semacam *hub* di kawasan ASEAN dari berbagai pusat pemeliharaan perdamaian serupa yang dimiliki oleh berbagai negara ASEAN sesuai dengan rencana yang telah disepakati di dalam *Plan of Action* dari *ASEAN Political Security Community*.

Dalam penyelesaian isu Sahara Barat, Indonesia mendukung kemerdekaan memilih rakyat Sahara untuk menentukan nasib sendiri melalui negosiasi antara pihak yang difasilitasi PBB. Indonesia mengharapkan tercapainya penyelesaian damai secara



komprehensif serta menemukan solusi terbaik untuk memecahkan permasalahan di Sahara Barat.

Dalam konteks intermestik, kinerja diplomasi Indonesia terus menunjukkan penguatan, baik dalam kerangka bilateral, regional maupun multilateral global. Mengakhiri keanggotaan tidak tetap Indonesia di Dewan Keamanan PBB selama dua tahun, Indonesia berhasil menempatkan diri sebagai *bridge and consensus builder*, di samping tetap kukuh memegang prinsipnya. Indonesia juga secara tegas menolak kecenderungan pemanfaatan DK-PBB untuk melahirkan norma baru yang bertentangan dengan norma atau konvensi internasional yang berlaku, dalam hal ini *United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS)*, seperti dalam upaya penanganan masalah bajak laut di wilayah perairan Somalia.

Sedangkan dalam hal penanganan terorisme, Indonesia telah banyak memberikan inisiatif dalam penyelenggaraan konferensi penanganan terorisme di tingkat regional, baik dalam kerangka ASEAN maupun dalam kerja sama intrakawasan melalui ASEM dan FEALAC, termasuk dalam kemitraan dengan Uni Eropa.

Kampanye antikorupsi masih relatif awal. Namun, sebagai *platform* politik, komitmen Indonesia di bidang ini menunjukkan kemantapannya untuk berperan aktif dalam diskursus internasional mengenai antikorupsi melalui *UNCAC (United Nations Convention Against Corruption)*, yang diselenggarakan di Indonesia pada awal tahun 2008, dan menggalang kerja sama internasional ke arah pengembalian aset hasil korupsi (*asset recovery*) di antaranya melalui peningkatan kerja sama yang mencakup masalah-masalah pertukaran informasi, intelijen, cecak, pencucian uang, perampasan aset, ekstradisi, dan *Mutual Legal Assistance (MLA)*.

Selama ini, Indonesia berperan aktif dalam ikut menciptakan kerjasama dan membantu terciptanya perdamaian diantara negara-negara OKI dan kawasan lainnya, antara lain peran Indonesia, dalam hal ini Menteri Luar Negeri selaku Ketua *Organization Islamic Conference Peace Committee for the Southern Philippines (OIC-PCSP)* yang dijabat sejak 2007 dan saat ini memasuki masa jabatan ke dua (2009-2011). Peluang Indonesia untuk memberikan kontribusi bagi terciptanya perdamaian di Filipina Selatan dalam kerangka Proses Perdamaian antara Pemerintah Filipina (GRP) dan *Moro National Liberation Front (MNLF)* sangat terbuka untuk dilakukan. Hal ini mengingat Indonesia, selaku Ketua OIC-PCSP, telah melakukan peran aktif dan memberikan kontribusi dalam upaya penyelesaian konflik di Filipina Selatan, khususnya dengan bertindak selaku fasilitator untuk menjembatani perundingan perdamaian GRP dan MNLF. Adapun proses perundingan dan pertemuan GRP-MNLF yang masih perlu untuk mendapat perhatian dalam kerangka OKI-PCSP dalam waktu dekat, antara lain rangkaian Pertemuan *Tripartite* GRP-MNLF-OKI dan rangkaian pertemuan lainnya seperti tingkat *working group* dan *legal panel* GRP-MNLF

Posisi Indonesia dalam OKI dirasakan cukup strategis antara lain karena Indonesia adalah merupakan negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia dan

sebagai negara demokrasi terbesar ke-3 di dunia dengan nuansa Islam moderat. Di Organisasi Konferensi Islam (OKI), Indonesia senantiasa mendukung berbagai inisiatif yang dilakukan demi efisiensi dan efektifitas OKI agar dapat lebih menyuarakan kepentingan negara-negara anggotanya. Dengan disahkannya Piagam baru OKI pada KTT ke-11 OKI di Dakar, Senegal, 13-14 Maret 2008, Indonesia akan mendukung langkah revitalisasi OKI di berbagai bidang kerjasama. Untuk itu, Indonesia akan memanfaatkan secara optimal peran serta Indonesia dalam berbagai bidang kerjasama OKI guna kepentingan nasional. Guna mengimplementasikan hal-hal tersebut diatas, Indonesia telah berencana untuk menjadi tuan rumah/penyelenggara KTT OKI pada tahun 2014.

Diplomasi Perbatasan yang Terkoordinasi untuk Menjaga Keutuhan Wilayah Darat, Laut, dan Udara Indonesia serta Menjaga Kekayaan Sumber Daya Alam Nasional

Terkait dengan penyelesaian masalah perbatasan, Pemerintah Indonesia telah berhasil melakukan diplomasi perbatasan dengan negara-negara tetangga yang memiliki perbatasan dengan Indonesia. Dalam hal perbatasan darat dengan Timor Leste, demarkasi batas darat RI-Timor Leste telah dituangkan ke dalam perjanjian batas darat yang ditandatangani tahun 2005. Perjanjian tersebut didasarkan *Treaty* 1904 antara Belanda dan Portugal. Perundingan Indonesia dengan Timor Leste mengenai perbatasan darat menjadi landasan untuk dapat melanjutkan pembahasan pada perundingan perbatasan laut. Batas darat RI-Malaysia juga tengah berada dalam proses penanganan demarkasinya, khususnya berkenaan dengan *Outsanding Border Problems* (OBP). Untuk batas yang sudah selesai, RI-Malaysia mempunyai kegiatan *Identification, Refixation, Maintenance* (IRM)). Batas darat RI-PNG sudah selesai ditetapkan dan pemeliharaan dilakukan dengan program IRM.

Dalam hal perbatasan maritim, Indonesia memiliki batas maritim dengan 10 negara. Dari kesepuluh negara tersebut, yang batas lautnya sama sekali belum ditetapkan adalah dengan Filipina, Palau, dan Timor Leste. Dengan Filipina, upaya yang saat ini tengah dilakukan adalah melaksanakan perundingan penetapan batas ZEE dan Landas Kontinen di Laut Sulawesi. Dengan Palau, proses awal untuk memulai perundingan batas laut telah berhasil disepakati pada tahun 2009.

Berkenaan dengan batas laut dengan Vietnam, Ratifikasi Perjanjian Batas Laut Kontinen (BLK) RI-Vietnam telah dilaksanakan pada Mei 2007 di Jakarta dan diharapkan kedua negara dapat segera memulai perundingan perbatasan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) sebagai payung hukum bagi pemajuan kerja sama perikanan RI-Vietnam serta penegakan hukum untuk memberantas *illegal, unreported and unregulated fishing*.

Perundingan batas maritim dengan Malaysia telah dilaksanakan 13 (tiga belas) kali dan perundingan yang ke-14 dilakukan pada bulan Agustus 2009. Dengan



Singapura, pada tanggal 10 Maret 2009 telah ditandatangani Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Singapura tentang Penetapan Garis Batas Laut wilayah kedua negara di bagian barat Selat Singapura. Hal ini merupakan capaian penting dalam diplomasi perbatasan Indonesia dan diharapkan akan menjadi *preseden* positif bagi upaya penyelesaian masalah perbatasan lainnya. Dengan selesainya batas laut pada segmen barat ini, antara RI-Singapura masih terdapat segmen timur 1 (di wilayah Batam-Changi) dan segmen timur 2 (wilayah sekitar Bintan-South Ledge/Middle Rock/Pedra Branca) yang masih perlu dirundingkan.

Penyelesaian batas wilayah Indonesia masih merupakan isu penting yang perlu mendapat perhatian. Masalah perbatasan tidak hanya menyangkut keutuhan wilayah NKRI, tetapi juga berkaitan dengan pemerataan pembangunan, terutama di daerah-daerah yang berbatasan dengan negara tetangga.

Pelayanan dan Perlindungan WNI/BHI di Luar Negeri

Dalam beberapa tahun terakhir, isu mengenai perlakuan tidak layak yang menimpa warga negara Indonesia (WNI) dan badan hukum Indonesia (BHI) di luar negeri menjadi sorotan internasional. Untuk itu, Indonesia memberikan perhatian lebih pada upaya perlindungan terhadap WNI/BHI di luar negeri sebagai bagian dari tanggung jawab negara terhadap warga negaranya. Isu ini relatif kompleks, sebab perlindungan terhadap WNI/BHI di luar negeri tidak dapat dipisahkan dari strategi dan kebijakan cegah dini di dalam negeri, sebelum WNI dan BHI tersebut melakukan kegiatan di luar negeri. Sebagaimana diketahui, dewasa ini terdapat jutaan warga negara Indonesia yang berada di luar negeri untuk berbagai aktivitas, antara lain sebagai tenaga kerja, anak buah kapal, pekerja profesional, mahasiswa, pengusaha, pelaku kawin campur, serta para pejabat negara yang melakukan kunjungan singkat ke luar negeri.

Perlindungan terhadap WNI maupun BHI yang telah dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia terbagi dalam dua kategori, yaitu perlindungan terhadap WNI dan BHI yang menjadi korban, dan perlindungan terhadap WNI dan BHI yang menjadi pelaku atau terlibat dalam kegiatan kejahatan atau pelanggaran hukum di luar negeri. Bagi kategori pertama, perlindungan diarahkan untuk memenuhi hak-hak warga negara Indonesia sesuai dengan peraturan yang berlaku, baik peraturan di negara bersangkutan maupun peraturan nasional. Sementara bagi WNI yang terlibat dalam kejahatan, perlindungan diarahkan untuk memperoleh perlakuan yang layak sesuai dengan standar kemanusiaan dan menghindari kemungkinan hukuman maksimum.

Dalam upaya perlindungan dan pelayanan WNI/BHI, Indonesia masih menempatkannya sebagai fokus diplomasi. Upaya perlindungan dan pelayanan terhadap WNI/BHI, khususnya perlindungan terhadap Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri telah menunjukkan kemajuan dengan dibentuknya Unit Pelayanan Publik (*Citizen Service Unit*) di beberapa Perwakilan RI seperti Singapura, Bandar Seri Begawan, Kuala

Lumpur, Damaskus, Amman, Doha dan Seoul. Pada tahun 2008 telah diresmikan 9 Citizen Service pada KBRI di Abu Dhabi, Kuwait City, Kuala Lumpur, Riyadh, KJRI Jeddah, Dubai, Kota Kinibalu, Johor Bahru, dan Hongkong. Pada tahun 2009 diresmikan 9 Citizen Services pada KBRI di Tokyo, KJRI Osaka, New York, Los Angeles, Sydney, Darwin, Perth, Kuching, dan Penang. Di samping itu, Indonesia sedang melaksanakan perundingan mengenai *Mandatory Consular Notification* (MCN) dengan negara-negara pengguna jasa TKI.

Peran Indonesia dalam Pemajuan Demokrasi, HAM, Lingkungan Hidup, dan Perlindungan Budaya

Politik luar negeri tidak hanya dimaksudkan untuk mengamankan kepentingan nasional Indonesia, melainkan juga memproyeksikan sistem nilai (*values*) pada tingkat nasional yang terus menguat, seperti demokrasi dan *good governance*, serta pemajuan dan perlindungan HAM.

Keberhasilan Indonesia melaksanakan pemilihan umum demokratis pada tahun 2004 dan telah menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara yang dianggap berhasil dalam membangun demokrasi. Keunggulan ini ditambah lagi dengan fakta bahwa Indonesia merupakan negara dengan penduduk mayoritas muslim terbesar di dunia. Keberhasilan Indonesia melaksanakan pemilihan umum menunjukkan kepada dunia internasional bahwa nilai-nilai demokrasi dan Islam dapat berdampingan secara damai dalam konstelasi yang harmoni. Pada saat di banyak negara di dunia, hubungan antara demokrasi dan Islam mendapatkan gugatan, Indonesia justru memposisikan diri sebagai negara yang dapat menyandingkan keduanya.

Pengakuan internasional terhadap posisi Indonesia dalam peta demokrasi dunia merupakan modal kuat dalam mengimplementasikan politik luar negeri Indonesia pada masa mendatang. Kepercayaan internasional terhadap motif Indonesia dan kepemimpinan Indonesia di kawasan Asia Tenggara dalam isu demokrasi dan hak asasi manusia merupakan citra baru Indonesia dalam pergaulan internasional.

Indonesia menginisiasi pelaksanaan *Bali Democracy Forum* (BDF) pada bulan Nopember 2008 yang dihadiri oleh 31 negara di dunia, termasuk negara-negara yang selama ini diketahui sensitif terhadap isu demokrasi, termasuk Myanmar, China, dan Brunei Darussalam. Forum yang mengusung tema "*Building and Consolidating Democracy: A Strategic Agenda for Asia*" ini menunjukkan kepemimpinan Indonesia dalam mengusung demokrasi sekaligus sebagai bagian dari upaya menyebarluaskan citra positif tentang Indonesia kepada dunia internasional. Dalam forum ini pula, Indonesia menunjukkan sikap yang menarik perhatian, sebab Indonesia mengarahkan agenda forum dalam kerangka "saling tukar pengalaman" mengenai implementasi



demokrasi di masing-masing negara peserta.

Konsistensi Indonesia dalam mempromosikan demokrasi juga tampak dari pembentukan *Institute for Democracy and Peace* (IDP). Sebagai tindak lanjut dari Bali Democracy Forum yang direncanakan akan menjadi forum tahunan, pemerintah Indonesia menginisiasi IDP dengan tujuan untuk menyiapkan wadah bagi pertukaran informasi dan gagasan bagi para intelektual dan praktisi dari berbagai negara dalam isu-isu demokrasi, sebagai wadah untuk menyediakan pelatihan bagi para praktisi dalam mengelola implementasi demokrasi (pemilihan umum, partai politik, dan lain-lain), dan melaksanakan kegiatan-kegiatan bersama dengan negara-negara lain untuk memperkuat implementasi demokrasi. Selain itu, IDP juga diarahkan untuk menjadi sentra informasi internasional melalui pengumpulan publikasi tentang demokrasi dan pembentukan jaringan internasional untuk promosi demokrasi khususnya di kawasan Asia dan dunia internasional pada umumnya.

Kiprah Indonesia di bidang pemajuan HAM diwujudkan dalam partisipasi aktif khususnya di Dewan HAM PBB sebagai pengganti Komisi HAM sejak 2006. Indonesia menjadi salah satu negara anggota paling pertama di Dewan HAM dan termasuk salah satu negara paling pertama yang menyampaikan pelaporan nasional di bawah mekanisme inovatif *Universal Periodic Review* pada tahun 2008. Melanjutkan tradisi partisipasi dan kontribusi konstruktif-nya, Indonesia saat ini menjabat sebagai Wakil Presiden Dewan bersama-sama Chile, Mesir, dan Slovenia sementara Belgia menjabat sebagai Ketua Dewan untuk periode 2009—2010. Indonesia merupakan salah satu dari sedikit negara yang bersikap terbuka dalam menerima berbagai mekanisme khusus HAM PBB untuk melakukan *country visit* ke Indonesia. Keterbukaan ini juga didasarkan pada kebutuhan untuk lebih mendorong pemajuan dan perlindungan HAM di tanah air dan sejalan dengan prinsip Indonesia untuk terus berbagi pengalaman di bidang HAM dengan masyarakat internasional, sekaligus membentuk pemahaman dan mencari solusi bersama atas persoalan HAM yang berbeda di satu negara dengan negara lainnya.

Hingga kini, Indonesia telah meratifikasi 7 (tujuh) instrumen hukum internasional yang mengatur promosi dan proteksi HAM yang diterima secara universal. Dengan demikian Indonesia tunduk terhadap berbagai aturan dalam konvensi-konvensi tersebut. Keenam instrumen HAM internasional tersebut adalah (1) Kovenan Internasional Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya - tahun 1976; (2) Kovenan Internasional Hak-hak Sosial dan Politik-tahun 1976; (3) Konvensi Internasional Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial-tahun 1969; (4) Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan-tahun 1981; (5) Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, dan Merendahkan Martabat Manusia - tahun 1987; (6) Konvensi Hak-hak Anak - tahun 1990.

Sebagai bagian dari upaya mengedepankan transparansi dan akuntabilitas di mata dunia internasional, Pemerintah Indonesia telah memenuhi kewajiban

pelaporannya kepada *treaty bodies*, yaitu kepada Komite Anti Penyiksaan (CAT); Komisi Penghapusan Diskriminasi Rasial (CERD); dan kepada Komite Penghapusan Bentuk-bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (CEDAW). Saat ini, laporan awal pemeriksaan Kovenan Hak-hak Sipil dan Politik, Kovenan Hak-hak Ekososbud, dan laporan periodik ke 3 dan ke 4 Konvensi Hak Anak, dan anti diskriminasi tengah dituntaskan.

Dalam aspek penguatan hubungan bilateral dan peningkatan kerja sama serta sebagai wahana berbagi pengalaman (*best practices*) dan upaya pembangunan kapasitas (*capacity building*) dalam bidang HAM dengan negara-negara sahabat, Indonesia telah mengadakan dialog HAM bilateral tahunan dengan Norwegia, Kanada, dan Swedia yang mencakup tema-tema hukum humaniter, hak anak, hak perempuan, hak penyandang cacat, mekanisme HAM Regional, *transnational justice* dan isu-isu multilateral. Beberapa negara lain juga telah mengemukakan minat serius untuk melaksanakan dialog HAM, yaitu Jepang dan Rusia, yang diharapkan segera dapat terwujud dalam waktu dekat.

Dalam upaya pemajuan HAM dan demokrasi di kawasan ASEAN, Indonesia memberikan dukungan kepada Myanmar guna melaksanakan *seven steps roadmap to democracy* bagi tercapainya demokratisasi dan rekonsiliasi di Myanmar untuk mewujudkan Pemilu Myanmar yang adil dan inklusif pada tahun 2010.

Hubungan Indonesia dan Timor Leste telah menjadi catatan sejarah yang penting bahwa beban sejarah hubungan Indonesia-Timor Leste mengenai tuduhan pelanggaran HAM “menjelang dan segera setelah jajak pendapat” dapat diselesaikan melalui pendekatan *truth and friendship*, yang diharapkan dapat mengunci opsi penyelesaian melalui tribunal internasional. Penerimaan Laporan Akhir Komisi Kebenaran dan Persahabatan (KKP) RI – Timor Leste oleh para pemimpin RI dan Timor Leste memperkokoh fondasi hubungan bilateral kedua bangsa sebagai negara yang bertetangga dekat dengan semangat menatap ke depan. Laporan Akhir KKP merupakan bentuk proses rekonsiliasi dan persahabatan kedua bangsa. Pemimpin kedua negara berkomitmen untuk melaksanakan rekomendasi-rekomendasi yang telah dihasilkan dalam Laporan Akhir KKP.

Komisi Kebenaran dan Persahabatan (KKP) merupakan komisi bilateral pertama di dunia, yang dapat menjadi contoh bagi kerja sama dan mekanisme untuk mencapai konsensus antara dua negara, bahkan untuk persoalan-persoalan yang sulit dan penuh tantangan.

Di samping itu, Indonesia merupakan salah satu dari sedikit negara yang memiliki RANHAM. Sejak era reformasi yang membawa semangat demokrasi di Indonesia, Pemerintah RI telah menempatkan upaya pemajuan dan perlindungan HAM sebagai pilar penting bagi kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Sejak tahun 1998, Indonesia telah mewujudkan sebuah program Rencana Aksi nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) yang menjadi panduan dalam pelaksanaan upaya pemajuan dan perlindungan HAM di tanah air, yang kini sudah berjalan selama 2 (dua) periode, yaitu 1998-2003 dan 2004-2009. Hal ini penting, mengingat bahwa Indonesia merupakan



bagian dari sedikit negara di dunia yang memiliki RANHAM. Generasi ketiga RANHAM tengah dituntaskan dan diharapkan akan menjadi agenda HAM Nasional bagi lima tahun ke depan (2010-2014).

Peran diplomasi lingkungan hidup juga makin diperkuat dengan kepemimpinan Indonesia dalam memprakarsai terbentuknya forum kerja sama negara-negara pemilik hutan tropis terbesar *Forest-Eleven* (F-11) yang terdiri dari: Indonesia, Brasil, Malaysia, Kongo, Republik Demokratik Kongo, Kolombia, Peru, Kosta Rika, Kamerun, Papua Nugini, Gabon. Negara-negara F-11 telah menegaskan komitmen kerja sama melalui kesepakatan para “*Leader*” yang dituangkan dalam *Joint Statement Tropical Rainforest Countries* di New York pada 24 September 2007.

Menonjolnya peran diplomasi lingkungan hidup Indonesia telah diakui masyarakat internasional dengan disahkannya *Bali Action Plan* (BAP) dan *Bali Roadmap* pada *Conference of Parties* (COP) UNFCCC di Bali, Desember 2007. Indonesia, bersama dengan Polandia, Denmark, dan Sekjen PBB melalui forum Troika+1, berupaya memandu dan mendorong negara-negara guna mencapai kesepakatan “*agreed outcome*” di Kopenhagen Desember 2009, dengan didasarkan pada BAP dan *Bali Roadmap*. *World Ocean Conference* (WOC) yang diselenggarakan di Manado pada bulan Mei 2009 atas inisiatif Indonesia telah menghasilkan *Manado Ocean Declaration* (MOD) yang mengamanatkan agar dimensi lautan (*ocean dimension*) dimasukkan ke dalam agenda pembahasan dan negosiasi perubahan iklim dalam kerangka UNFCCC. Pembahasan dan perundingan perubahan iklim sejauh ini belum memasukkan agenda kelautan padahal dampak perubahan iklim terhadap sektor kelautan telah sangat nyata yang akan merusak ekosistem laut dan mengancam kehidupan sosial ekonomi masyarakat pesisir.

Dalam kerangka kerja sama regional, Indonesia sebagai penggagas *Coral Triangle Initiative on Coral Reefs, Fisheries and Food Security* (CTI-CFF) telah berhasil menyelenggarakan Konferensi Tingkat Tinggi (*Summit*) CTI-CFF di Manado, 15 Mei 2009. *Summit* yang dihadiri pula oleh Malaysia, Papua Nugini, Filipina, Solomon Islands, dan Timor-Leste tersebut secara resmi meluncurkan inisiatif pelestarian terumbu karang dan mengadopsi *Regional Plan of Action* (RPoA). *Outstanding issues* terkait dengan upaya menjadikan Indonesia sebagai lokasi sekretariat regional dan penjabaran lebih lanjut dari RPoA, khususnya perihal mekanisme koordinasi, penentuan mitra implementasi, penyaluran bantuan sesuai dengan prioritas nasional, serta mekanisme kerja sekretariat agar mencerminkan *inter-governmental process*.

Dalam isu perubahan iklim, menyusul keberhasilan *Bali Conference* yang mengesahkan *Bali Roadmap*, Indonesia ikut serta *Copenhagen Conference* 2009 yang telah dapat diduga tidak dapat menghasilkan kesepakatan yang mengikat secara hukum. Namun demikian, penting bagi Indonesia untuk terus memelihara momentum positif yang ada agar tercapai komitmen yang mengikat secara hukum pada tahun 2010.

Dalam isu perlindungan budaya, *genetic resources, traditional knowledge, and folklore* (GRTKF) atau Sumber Daya Genetik, pengetahuan tradisional, dan ekspresi

budaya tradisional adalah isu yang penting diperhatikan oleh pemerintah Indonesia mengingat isu ini berkaitan dengan hal-hal yang berpotensi menimbulkan konflik dengan negara lain jika tidak segera ada aturan hukum untuk mengaturnya. Selama ini negara-negara maju mengedepankan dan mengakui secara absolut hak kepemilikan ekonomis dari individu yang direfleksikan dalam aturan HAKI internasional mengenai hak cipta, paten, merek, dan rahasia dagang. Di sisi lain, unsur yang paling menonjol dari GRTKF adalah kepemilikan bersama berdasarkan unsur komunitas atau masyarakat yang diwarisi secara turun temurun. Perbedaan pandangan inilah yang mengakibatkan terjadinya kekosongan hukum dalam perlindungan GRTKF di tingkat internasional. Di samping itu, belum ada aturan hukum di tingkat nasional yang mengatur tentang GRTKF.

Indonesia aktif melakukan diplomasi budaya untuk menyukseskan berbagai nominasi budaya unggulan Indonesia di UNESCO. Pada tahun 2008, Wayang (Puppet Theatre Indonesia) dan the Indonesiaan Keris telah diakui ke dalam *Representative List of Intangible Cultural Heritage* setelah sebelumnya dinyatakan sebagai *Masterpiece of the Coral and Intangible Heritage Humanity*. Pada tahun 2009 Indonesia berhasil juga memasukkan Batik Indonesia ke dalam *Representative List of Intangible Cultural Heritage*. Hal ini merupakan salah satu bentuk pengakuan terhadap asal usul Batik yang asli Indonesia. Sebagai negara pihak Konvensi UNESCO, Indonesia memiliki komitmen dalam hal perlindungan warisan budaya tak teraga yang diratifikasi oleh Indonesia pada tahun 2007.

Diplomasi kesehatan Indonesia telah pula membuka mata dunia terhadap adanya ketidakadilan dalam mekanisme kesehatan global dan juga meningkatkan pemahaman tentang perlunya menelaah isu-isu kesehatan global secara multisektoral termasuk dari sudut pandang kebijakan luar negeri. Indonesia juga mendesak disepakatinya pengiriman virus dengan menggunakan *Standard Material Transfer Agreement* yang lebih adil dan transparan, *timely traceability mechanism* untuk penggunaan contoh virus serta adanya WHO *Advisory Committee* yang terdiri dari pakar kesehatan dan bertugas mengawasi pelaksanaan *framework of virus sharing and vaccines access*.

Sebelumnya, Indonesia telah pula menunjukkan prakarsanya dengan menyelenggarakan Sidang Forum Asia Afrika (FAA) tahun 2007 yang diikuti 50 negara pada tanggal 18 hingga 20 Juni 2007 di Bandung. Pertemuan ini melahirkan "Deklarasi Bandung" tentang Upaya Perlindungan Sumber Daya Genetika, Pengetahuan Tradisional, dan Ekspresi Folklore (SDGPTEF). "Deklarasi Bandung" berisi 11 butir kesepakatan untuk meningkatkan posisi tawar negara-negara kawasan Asia-Afrika, dalam upaya memberi perlindungan terhadap SDGPTEF di tingkat internasional.

Atas inisiatif Indonesia, pertemuan diplomatik negara sehaluan (*Like Minded Countries/LMCs*) telah diselenggarakan di Bali tanggal 23—27 November 2009, dihadiri oleh sejumlah wakil negara-negara Afrika, Asia dan Amerika Latin, serta para ahli dari WIPO, WTO, FAO dan *South Centre*. Pertemuan tersebut membahas secara terperinci dokumen *draft* teks mengenai perlindungan GRTKF dan menyepakati bahwa *draft* teks tersebut dapat menjadi dasar bagi dimulainya perlindungan secara tekstual (*text-based*



negotiations) draft traktat atau instrumen hukum internasional perlindungan GRTKF.

Kemitraan Strategis di Kawasan Asia Pasifik dan Afrika, serta Kawasan Amerika dan Eropa

Diplomasi bilateral Indonesia tidak terbebas dari konteks krisis multidimensi pada tingkat global dan dinamika integrasi kawasan. Bangunan-bangunan kemitraan strategis yang dikembangkan Indonesia sejak beberapa tahun terakhir terus diperkuat dengan merampungkan *Plans of Action*, optimalisasi persetujuan-persetujuan bilateral, dan menambah kemitraan baru seperti dengan Afrika Selatan dan Brazil. Indonesia bersama dengan Afrika Selatan mengisi lebih lanjut kemitraan strategis Asia Afrika (*New Asia Africa Strategic Partnership-NAASP*) sebagai perangkat/mechanisme pemajuan kerja sama bilateral yang saling menguntungkan antara Indonesia dan negara-negara di kawasan Afrika.

Sementara itu, situasi politik/keamanan di Asia Timur cukup tertangani dengan baik. Kawasan Asia Timur telah menjadi suatu wilayah yang dengan cepat mendapat perhatian dunia karena berbagai perkembangan yang telah terjadi di sana. Pemerintah Indonesia juga memperhatikan secara seksama pengelolaan hubungan China-Taiwan di bidang politik yang berdampak pada kondusifitas keamanan di kawasan.

Indonesia telah merampungkan dokumen kemitraan strategis dengan China pada bulan April 2005. Kedua negara sepakat untuk membangun hubungan yang lebih sistematis dalam tiga bidang, yaitu di bidang politik, bidang pertahanan dan keamanan, dan bidang ekonomi dan pembangunan. Ketiga pilar ini akan ditopang secara solid melalui kerangka kerja sama pemerintah (*government to government*), masyarakat (*people to people*), dan pengusaha (*business to business*). Dalam waktu dekat diharapkan Indonesia dapat merampungkan rancangan (*plan of actions*) PoA Deklarasi Kemitraan Strategis RI-RRC.

Sementara itu, kemitraan strategis Indonesia dengan Korea Selatan telah dideklarasikan pada bulan Desember 2006. Kedua negara sepakat untuk memperkuat hubungan bilateral dalam berbagai bidang. Terdapat tiga alasan, antara lain, yang mendasari kemitraan strategis ini, yaitu hubungan bilateral Indonesia-Korea Selatan selama ini berlangsung hampir tanpa masalah, ekonomi kedua negara saling melengkapi, dan kedua negara memiliki pengalaman melakukan transformasi di berbagai bidang dalam beberapa tahun terakhir. Beberapa kesepakatan kerja sama baru Indonesia-Korea Selatan telah direalisasikan seperti *Joint Declaration on Strategic Partnership to Promote Friendship and Cooperation* pada abad ke-21, kerja sama di bidang ekonomi, kerja sama pemberantasan korupsi, kehutanan, pertahanan, ketenagakerjaan, dan pembelian pesawat jenis CN 235 dari Indonesia.

Korea Selatan juga telah menjadi salah satu mitra penting ASEAN. Perjanjian Perdagangan Bebas ASEAN dan Korea Selatan saat ini telah diimplementasikan dan pada

tahun 2009 ini direncanakan akan tercapai penurunan tarif hingga 0% terhadap produk-produk dari negara-negara anggota ASEAN oleh Korea Selatan. Hingga tahun 2008, Indonesia adalah negara tujuan keempat terbesar --setelah China, Amerika Serikat, dan Vietnam--bagi investasi Korea. Total investasi Korea di Indonesia dalam tujuh tahun terakhir sebesar 4,8 miliar dolar AS yang menjadikan Korea investor ketujuh terbesar di Indonesia. Ada sekitar 1.200 perusahaan Korea di Indonesia, terbanyak di antara perusahaan asing di Indonesia.

Kemitraan Komprehensif Indonesia–Vietnam yang telah dideklarasikan sejak tahun 2003 juga secara intensif telah dibahas, terutama setelah kunjungan Presiden Republik Indonesia ke Vietnam pada tahun 2005 dan kunjungan balasan Perdana Menteri Republik Sosialis Vietnam pada tahun 2006. Kedua negara memiliki ikatan sejarah yang kuat yang dapat menjadi potensi untuk dikembangkan pada masa mendatang dalam bentuk kerja sama kemitraan strategis yang lebih kokoh, sebagai bentuk yang lebih mengikat daripada kemitraan komprehensif yang selama ini telah berlangsung.

Nota Kesepahaman antara Indonesia dengan Laos telah ditandatangani tanggal 20 Februari 2009 untuk mengembangkan kerja sama di bidang pertanian. Dengan Kamboja, kerja sama ke depan dikembangkan berdasarkan kesepakatan Komisi Bersama yang telah dibentuk pada tanggal 18 Februari 1997.

Selain itu, peran *constructive engagement* Indonesia dalam penanganan isu Myanmar pada tataran bilateral semakin diperkokoh, terutama dengan telah dibentuknya mekanisme *Joint Consultation for Bilateral Cooperation* (JCBC) RI-Myanmar pada tingkat Menteri Luar Negeri pada kunjungan Presiden RI ke Myanmar, Maret 2006. Salah satu *crucial* dan *sensitive issue* yang dihadapi Indonesia-Myanmar adalah penanganan manusia perahu Myanmar di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang memasuki perairan Indonesia pada awal tahun 2009.

Indonesia juga berperan besar dalam forum regional lainnya, baik sebagai tuan rumah maupun peserta aktif pertemuan-pertemuan *New Asia Africa Strategic Partnership* (NAASP), *Asia Cooperation Dialogue* (ACD), *Asia Middle-East Dialogue* (AMED), *Southwest Pacific Dialogue* (SwPD), *Indian Ocean Rim Association for Regional Cooperation* (IOR-ARC) yang bertujuan untuk meningkatkan kerja sama politik, ekonomi dan perdagangan, serta sosial budaya. Dalam *scope* yang lebih kecil, Indonesia juga berperan aktif dalam kerja sama subkawasan seperti Brunei Darussalam – Indonesia – Malaysia – Philippines *East ASEAN Growth Area* (BIMP-EAGA) dan Indonesia – Malaysia – Thailand *Growth Triangle* (IMT-GT).

Kemitraan Strategis di Kawasan Amerika dan Eropa menunjukkan kemajuan dalam lima tahun ini. Contohnya adalah hubungan Indonesia-Amerika Serikat yang mengalami kemajuan yang berarti pada tahun 2009. Kesepakatan pembentukan Kemitraan Komprehensif Indonesia-AS telah dicapai pada saat kunjungan Menlu Hillary Clinton ke Jakarta pada tanggal 18-19 Februari 2009, untuk dapat diumumkan pada



kesempatan kunjungan Presiden Obama ke Indonesia yang direncanakan pada tahun 2010. Di bidang peningkatan *people to people contact*, telah ditandatangani *MoU American Indonesian Exchange Foundation (AMINEF)* pada 16 Februari 2009 dan *Peace Corps (PC)* pada 11 Desember 2009, yang merupakan babak baru kedatangan *Peace Corps* ke Indonesia setelah terhenti sejak tahun 1963. Nota Kesepahaman AMINEF merupakan perpanjangan kesepakatan sebelumnya untuk pemberian beasiswa kepada pelajar/mahasiswa Indonesia untuk melanjutkan pendidikannya di Amerika Serikat.

Secara simultan, upaya Indonesia untuk membangun kemitraan strategis juga telah disepakati dengan Brazil. *Memorandum of understanding* antara kedua negara telah ditandatangani pada bulan Nopember 2008 antara menteri luar negeri kedua negara. Diharapkan dalam waktu yang tidak terlalu lama, kemitraan strategis antara kedua negara dapat dideklarasikan untuk memperkuat kerangka kerja sama yang telah berlangsung selama ini.

Indonesia memandang penting kerja sama dalam kerangka *Forum for East Asia-Latin America Cooperation (FEALAC)* dalam kaitannya dengan upaya untuk memperkuat hubungan kerja sama antara negara-negara di kedua kawasan. Sejak pendirian FEALAC pada tahun 1999, negara-negara Amerika Latin telah menjadi mitra dagang Indonesia yang semakin penting. Untuk periode 2007—2009, Indonesia telah menjadi ketua kelompok kerja (Pokja) FEALAC bidang Politik, Kebudayaan, dan Pendidikan. Komitmen Indonesia sebagai ketua pada pokja tersebut terlihat dari berbagai peran Indonesia dalam meningkatkan kerja sama FEALAC dalam kerangka Pokja tersebut.

Bagi politik luar negeri Indonesia, *The Asia-Europe Meeting (ASEM)* merupakan “jembatan” yang dibangun untuk mengurangi celah (*gap*) antara kedua kawasan. ASEM juga merupakan salah satu media bagi Indonesia untuk memperkuat posisi di antara negara-negara Asia dalam bekerja sama dengan Eropa (UE). Kerja sama bidang ekonomi merupakan bidang yang terus diupayakan melalui ASEM. Guna mendukung upaya ini, telah dibentuk *Asia Europe Business Forum (AEBF)* dengan anggota para pelaku bisnis dari negara-negara ASEM. Antara AEBF dan forum resmi ASEM dilakukan dialog dengan harapan dicapai suatu keharmonisan antara pengambil kebijakan dan pelaku bisnis.

ASEM, antara lain, juga dimanfaatkan sebagai media untuk penguatan kemampuan Indonesia dalam menghadapi peraturan/standar yang ditetapkan UE dan juga dalam menghadapi aturan-aturan WTO. Sementara itu, kerja sama di bidang sosial dan budaya merupakan satu pilar kerja sama yang digunakan Indonesia, antara lain guna meningkatkan SDM dan pemahaman mengenai keragaman budaya negara-negara anggota ASEM.

Sejalan dengan komitmen Indonesia untuk meningkatkan kerja sama konkret dalam kerangka ASEM, pada tahun 2008—2009, Indonesia telah menjadi co-sponsor dan berpartisipasi secara aktif dalam berbagai program ASEM di ketiga pilarnya (politik, ekonomi dan sosial budaya).

Peningkatan hubungan kerja sama Indonesia dan Uni Eropa (UE) juga ditandai

dengan penandatanganan *Partnership and Cooperation Agreement (PCA)* pada tanggal 9 November 2009. PCA tersebut menjadi payung hukum bagi kerja sama Indonesia-UE yang diprioritaskan antara lain pada kerja sama perdagangan dan investasi, pendidikan, lingkungan hidup dan *institutional building*. Di samping itu, dalam rangka pencabutan larangan terbang bagi maskapai Indonesia di wilayah udara UE, baik upaya negosiasi maupun usaha perbaikan ke dalam yang dilakukan Pemri telah membuahkan hasil. Melalui regulasi No.619/2009 tanggal 13 Juli 2009, Komisi Eropa secara resmi telah mencabut larangan terbang di wilayah udara UE bagi empat maskapai penerbangan Indonesia, yaitu Garuda Indonesia, Mandala, PrimeAir dan Airfast. Sejak tanggal 16 Juli 2009, keempat maskapai penerbangan Indonesia tersebut telah diizinkan untuk kembali terbang di wilayah udara UE. Saat ini Indonesia tengah mengupayakan pencabutan pelarangan penerbangan untuk 4 maskapai berikutnya, yaitu Lion, Mentari Airlines, Metro Batavia, Indonesia Air Asia, dan Travira Air

Pelaksanaan Diplomasi Ekonomi

Terkait kiprah diplomasi ekonomi, Indonesia berhasil terpilih sebagai satu-satunya negara kawasan Asia Tenggara yang menjadi anggota G-20. Dalam forum tersebut, Indonesia telah memberikan kontribusi yang penting dengan menyuarakan pandangan dan *concerns* negara-negara berkembang, antara lain menekankan pentingnya menjamin likuiditas keuangan global, kepercayaan terhadap perbankan, dan upaya menjamin aliran kredit perbankan. Tantangan pengelolaan diplomasi ekonomi akan semakin meningkat sejalan dengan terjadinya krisis ekonomi global yang diakibatkan oleh krisis kredit perumahan (*subprime mortgage crisis*) di AS. Dampak krisis ekonomi telah menimbulkan merosotnya ekonomi di banyak negara termasuk negara maju. Namun, sejauh ini Indonesia tetap mampu menjaga momentum pertumbuhan ekonomi yang positif.

Peran diplomasi Indonesia dalam perundingan *Doha Development Agenda* di *World Trade Organization (WTO)* telah turut menentukan arah hasil perundingan yang akan dicapai. Peran dan kepemimpinan Indonesia dalam Kelompok G-33 (terdiri atas 46 negara berkembang anggota WTO) yang konsisten memperjuangkan diterimanya fleksibilitas *Special Products (SPs)* dan *Special Safeguard Mechanism (SSM)* bagi negara berkembang juga telah mendapatkan pengakuan masyarakat internasional dan menjadikan Indonesia sebagai salah satu pemain utama yang diperhitungkan.

Di samping itu, Indonesia juga berperan aktif dalam mendorong penyelesaian segera dan tercapainya hasil perundingan Doha yang berdimensi pembangunan, seimbang, dan lebih adil. Tercapainya kesepakatan Doha tersebut akan membantu mengatasi dampak krisis ekonomi dan keuangan global serta memberikan kontribusi bagi pembangunan di negara berkembang.



Peran Serta Indonesia dalam Kerja sama Selatan-Selatan

Kerja Sama Selatan Selatan (KSS) merupakan manifestasi kerja sama antarnegara berkembang yang didasarkan pada prinsip-prinsip antara lain, solidaritas, nonkondisionalitas, *mutual benefit* dan *non-interference*.

Sebagai negara berkembang yang memiliki potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, serta berbagai keunggulan dalam ekonomi dan politik internasional, Indonesia telah menjadi bagian penting dalam Kerja sama Selatan-Selatan. Pada bulan September 2008, UNDP telah mengalokasikan dana siap pakai sebesar US\$ 3 juta untuk program Kerja sama Selatan-Selatan yang melibatkan Indonesia dan Sri Lanka sebagai negara pilot di Asia untuk mendorong kerja sama regional di bidang tata pemerintahan daerah, partisipasi masyarakat, pembangunan ekonomi lokal, serta peningkatan akses pelayanan sosial khususnya di bidang pendidikan dan kesehatan. Kepercayaan yang diberikan kepada Indonesia sebagai negara pilot merupakan bukti strategisnya posisi Indonesia dalam kerja sama Selatan-Selatan.

Hubungan Indonesia dengan sesama negara berkembang telah berkembang bukan saja pada bidang ekonomi dan politik, tetapi juga telah mencakup bidang-bidang teknis dan fungsional. Indonesia berpartisipasi aktif dalam *Global Platform for Disaster Risk Reduction* yang telah berlangsung sebanyak dua kali di Jenewa, Swiss, yaitu sesi pertama pada bulan Juni 2007, dan sesi kedua pada bulan Juni 2009. Forum yang diinisiasi oleh Kerja sama Selatan-Selatan ini merupakan wadah berbagi informasi dan bertukar pengalaman dalam pencegahan dan penanganan bencana alam. Pengalaman Indonesia dalam penanganan bencana tsunami dan gempa bumi yang terjadi secara beruntun merupakan modal yang dapat dibagikan kepada sesama negara berkembang dalam rangka mendukung peningkatan citra positif.

Afiliasi Indonesia melalui Kerja sama Selatan-Selatan untuk manajemen mitigasi bencana sebelumnya telah berlangsung melalui inisiatif Indonesia bersama-sama *Non Alignment Movement Center for South-South Technical Cooperation* (NAM CSSTC) yang didukung oleh UNESCAP dan Pemerintah Jerman untuk menggelar loka karya *Project on South-South Cooperation for Tsunami and other Disasters Risk Management*. Inisiatif ini didukung oleh 10 negara di Asia Pasifik, yaitu Bangladesh, China, Fiji, India, Indonesia, Iran, Maldives, Filipina, Srilanka dan Thailand. Pada akhir tahun 2008, lima negara yaitu Laos, Mynmar, PNG, Timor Leste dan Vietnam ikut bergabung. Indonesia menjadi sekretariat *ad interim* untuk kerja sama 15 negara tersebut. Berbagai kegiatan telah dilakukan, antara lain lokakarya keterkaitan antara adaptasi perubahan iklim dengan “*risk disaster reduction*” dan strategi untuk mendorong efektivitas kemitraan untuk mengembangkan *Regional South-South Cooperation Mechanism*. Untuk kegiatan tersebut, telah diidentifikasi sejumlah inisiatif dan area prioritas di bawah kerangka *Hyogo Framework of Action*. Pada inisiatif tersebut, Indonesia menjadi focal point proyek *Human Resources Development*. Bekerja sama dengan Pusat Riset Tsunami dan Mitigasi Bencana Universitas Syah Kuala, Pemerintah Indonesia dan NAM CSSTC

menjajaki kerja sama dengan *Global Facility for Disaster Reduction and Recovery (GFDRR) South-South Cooperation Program World Bank*.

Kerja sama Selatan-Selatan adalah suatu bentuk alternatif kerja sama pembangunan untuk konteks *middle income country* pada level yang lebih rendah seperti halnya kondisi Indonesia. Komitmen Indonesia untuk berperan dalam Kerja sama Selatan-Selatan juga ditunjukkan dengan masuknya topik Kerja sama Selatan-Selatan dalam *Jakarta Commitment Aid for Development Effectiveness* yang ditandatangani oleh Pemerintah Indonesia dan segenap partner pembangunan pada awal tahun 2009. Posisi Indonesia relatif strategis untuk melakukan kerja sama tripartit dengan negara maju sebagai donor, negara berkembang sebagai penerima bantuan, dan Indonesia sebagai katalisator kerja sama tersebut baik dalam memberikan dukungan teknik maupun finansial.

Melalui keanggotaannya dalam berbagai fora internasional, seperti Kelompok 77 dan China, *Gerakan Non Blok (GNB)*, G-15, D-8, ASEAN, *New Asia Africa Strategic Partnership (NAASP)*, dan forum KSS lainnya di bawah PBB, Indonesia senantiasa berupaya mendorong KSS seraya mendesak negara maju untuk memenuhi komitmen *Official Development Assistance (ODA)*-nya. Dalam forum Kelompok 77 dan China misalnya, KSS mendapatkan tempat tersendiri di antara negara anggota, hal ini ditandai oleh adanya penyelenggaraan *South Summit (KTT Selatan-Selatan)*, yang hingga saat ini telah diselenggarakan sebanyak dua kali yaitu di Havana, Kuba, tahun 2000, dan di Doha, Qatar, tahun 2005. Hasil KTT Selatan ke-2 di Doha berupa *Doha Declaration* dan *Doha Plan of Action*. Deklarasi Doha memuat berbagai isu dimensi pembangunan yang menjadi agenda internasional antara lain penguatan multilateralisme termasuk kerja sama regional dan antarkawasan seperti *New Asia Africa Strategic Partnership (NAASP)*, dialog antarperadaban, *good governance*, masyarakat madani, lanskap baru ekonomi internasional, transfer teknologi, dan reformasi PBB. Sedangkan *Doha Plan of Action* memuat rencana aksi untuk untuk menindaklanjuti komitmen negara anggota yang telah tercakup dalam *Havana Plan of Action* yang dihasilkan KTT Selatan-Selatan ke-1 di Havana. KTT Selatan-Selatan ke-3 akan dilaksanakan tahun 2010 di kawasan Afrika.

Pada kesempatan *High Level United Nations Conference on South-South Cooperation*, di Nairobi, Desember 2009 untuk memperingati 30 tahun *Buenos Aires Plan of Action*, juga telah dibahas kemajuan yang telah dicapai KSS sejak diadopsinya *Buenos Aires Plan of Action. Nairobi Outcome Document* yang dihasilkan Konperensi ini antara lain berisi pengakuan bahwa KSS telah berhasil mendukung pertumbuhan ekonomi dalam pembangunan di negara berkembang, menyambut baik berbagai inisiatif tingkat nasional dalam pelaksanaan KSS, mendesak negara donor untuk mendukung pembiayaan program KSS dan perlunya PBB memainkan peran aktif dalam memajukan KSS. Selanjutnya, *Nairobi Outcome Document* akan menjadi arahan KSS di masa-masa yang akan datang.



6.2.2 Permasalahan dan Sasaran Pembangunan

Kebijakan politik luar negeri Indonesia tidak dilakukan dalam suatu kevakuman. Lingkungan global saat ini dan masa mendatang menjadi pertimbangan dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan politik luar negeri dalam lima tahun ke depan.

6.2.2.1 Permasalahan

Peran dan kepemimpinan Indonesia dalam implementasi Piagam ASEAN dan pembentukan Komunitas ASEAN 2015

Peran dan kepemimpinan Indonesia dalam melaksanakan Piagam ASEAN sangat ditentukan oleh komitmen Indonesia untuk melaksanakan Piagam ASEAN, di samping mendorong anggota ASEAN lainnya untuk melaksanakan Piagam ASEAN tersebut menuju terbentuknya Komunitas ASEAN pada tahun 2015. Namun, dalam melaksanakan Piagam ASEAN tersebut, Pemerintah Indonesia menghadapi permasalahan masih kurangnya pemahaman publik domestik terhadap pembentukan komunitas ASEAN pada tahun 2015. Situasi ini terjadi pada berbagai level, baik pada level pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, juga pada level masyarakat. Gagasan integrasi ASEAN yang hendak dibangun dengan prinsip *people oriented integration* (integrasi berorientasi warga) membutuhkan partisipasi dan kesadaran seluruh komponen masyarakat mengenai ASEAN masa depan yang akan menjadi kawasan terintegrasi, baik secara ekonomi, politik, maupun sosial budaya. *Blue print* ASEAN dan *action plan* Piagam ASEAN perlu diintegrasikan ke dalam peraturan perundang-undangan di tingkat nasional dan daerah.

Kurangnya pemahaman publik tersebut disebabkan oleh Pemerintah belum mempersiapkan secara komprehensif dan sistematis materi pelaksanaan Piagam ASEAN atau *Grand Design* Nasional pelaksanaan Piagam ASEAN yang perlu disosialisasikan kepada seluruh pemangku kepentingan di Indonesia. *Grand Design* tersebut berisi persiapan dan implementasi *groundworks* dan infrastruktur ASEAN yang memiliki standar yang harus dipenuhi oleh seluruh anggota ASEAN termasuk Indonesia.

Sekretariat ASEAN yang berfungsi untuk melakukan monitoring pencapaian setiap anggota ASEAN terhadap pelaksanaan rencana tindak sampai dengan tahun 2015 belum mendapatkan dukungan penuh dalam operasionalisasinya.

Kepemimpinan Indonesia akan semakin kuat di ASEAN terutama dengan kedudukannya sebagai Ketua ASEAN pada tahun 2013. Dengan kedudukan sebagai Ketua ASEAN, merupakan tantangan bagi Indonesia untuk membuktikan kepemimpinannya terutama baik di dalam negeri dalam menggalang komitmen dan wujud konkrit serta mendorong negara-negara anggota ASEAN dan penyelesaian rencana aksi Piagam ASEAN menuju perwujudan komunitas ASEAN pada tahun 2015.

Peran Indonesia dalam menjaga keamanan nasional dan menciptakan perdamaian dunia

Internasionalisasi Papua masih merupakan potensi yang dapat mengganggu kepentingan nasional Indonesia. Permasalahan yang saat ini dihadapi adalah masih adanya rasa ketidakpuasan yang ditunjukkan oleh kelompok tertentu yang mengambil basis di negara-negara yang memiliki hubungan baik dengan Indonesia. Kenyataan ini mendatangkan ketidakpuasan bagi negara-negara sahabat yang dijadikan basis kelompok tersebut. Menjadi pekerjaan yang tidak mudah bagi Indonesia untuk memastikan kepada negara-negara sahabat bahwa isu Papua sama sekali tidak berkaitan dengan persoalan hak asasi manusia sebagaimana yang selama ini disuarakan oleh kelompok-kelompok tertentu dan tuntutan sekelompok orang untuk memisahkan diri membutuhkan intervensi dan penyelesaian secepatnya.

Laut China Selatan merupakan kawasan yang berpotensi mengganggu keamanan nasional Indonesia mengingat kawasan tersebut merupakan titik api bagi kepentingan-kepentingan strategis negara-negara besar, seperti China dan Amerika Serikat. Sejak Maret 2009, sebagai contoh aktual, situasi laut China Selatan menghangat setelah insiden tidak menyenangkan yang dilakukan oleh Angkatan Laut China terhadap kapal-kapal pengintai Amerika Serikat karena dianggap telah melintasi wilayah ZEE China di Laut China Selatan. Insiden tersebut mendorong pihak AS menempatkan beberapa kapal perusak untuk mengawal kapal-kapal pengintai AS di wilayah tersebut. Bagi Indonesia, penanganan konflik di Laut China Selatan sangatlah penting mengingat Laut China Selatan merupakan pintu terdepan Indonesia dari wilayah Barat Laut, serta Laut China Selatan merupakan jalur transportasi laut bagi Indonesia dan Asia Timur sehingga gangguan yang muncul akan berpengaruh terhadap ekonomi Indonesia, keutuhan dan kedaulatan RI, dan aspek kepentingan nasional lainnya.

Sebagaimana halnya dengan Laut China Selatan, Selat Malaka juga merupakan kawasan yang dapat membawa dampak buruk terhadap kepentingan nasional Indonesia. Salah satu persoalan penting adalah masalah internasionalisasi aspek keamanan selat Malaka oleh negara-negara besar yang berkepentingan menggunakan jalur tersebut.

Di samping masalah Papua, Laut China Selatan, dan Selat Malaka, beberapa isu keamanan internasional yang diperkirakan masih akan menjadi isu pada masa lima tahun mendatang dan berkaitan dengan kepentingan nasional Indonesia antara lain:

Pertama, kejahatan terorganisasi lintas negara (*transnational organized crime, TOC*) yang merongrong *human security*. Permasalahan utama yang dihadapi oleh Indonesia adalah PBB belum memiliki kerangka instrumen internasional yang bersifat multilateral dan komprehensif yang dapat dijadikan acuan bagi setiap negara termasuk Indonesia untuk mengatasi pembalakan liar (*illegal logging*) dan *illegal fishing* secara bersama-sama. Kejahatan lintas negara tidak dapat diselesaikan hanya oleh Indonesia

sendiri. Konvensi TOC PBB hanya mengidentifikasi 5 kejahatan transnasional, yaitu korupsi, pencucian uang, perdagangan orang, penyelundupan orang, dan perdagangan gelap senjata. Padahal masih terdapat berbagai jenis kejahatan transnasional lainnya saat ini yang dihadapi oleh negara-negara di dunia termasuk Indonesia. Kejahatan transnasional tersebut adalah *cyber-crime*, *financial economic crimes*, perdagangan gelap organ manusia, dan *environmental crimes*. Oleh karena itu, dalam lima tahun ke depan, tantangan bagi Indonesia untuk menawarkan *platform* baru kerangka multilateral untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan kejahatan lintas negara yang diterima oleh negara-negara PBB dan sesuai dengan kepentingan nasional Indonesia.

Kedua, terjadinya perpindahan warga beberapa negara di Asia Selatan, Timur Tengah dan Asia Tenggara akibat konflik internal dan instabilitas politik. Perpindahan warga negara tersebut dipicu oleh situasi keamanan dan politik yang tidak kondusif, yang pada gilirannya berdampak pada memburuknya kondisi perekonomian negara tersebut sehingga mendorong warganya untuk mencari penghidupan yang lebih baik di luar negeri. Selain itu, warga negara tersebut menjadi korban dari kebijakan diskriminasi oleh rejim politik domestiknya. Indonesia selama ini dan pada beberapa tahun mendatang masih akan tetap dijadikan sebagai salah satu negara transit migrasi sebelum menuju ke negara-negara tujuan akhir di Australia dan New Zealand sehingga berpotensi, antara lain, menimbulkan konflik sosial ekonomi dengan penduduk Indonesia, dan masuknya ideologi terror dan kekerasan ke dalam masyarakat Indonesia.

Ketiga, isu-isu keamanan nontradisional seperti kelangkaan pangan dan energi dunia saat ini berpengaruh pada keamanan dan perdamaian dunia. Kelangkaan pangan membawa konsekuensi meningkatnya harga pangan dunia, arus impor dan ekspor pangan, serta munculnya fenomena pengambilalihan lahan milik negara-negara subur yang dilakukan secara masif oleh negara-negara importir pangan serta negara yang memiliki keterbatasan sumber daya air dan lahan tetapi memiliki dana melimpah. Sebagaimana kelangkaan pangan, kelangkaan energi dapat menimbulkan persoalan serius terhadap hubungan antarnegara di dunia. Dewasa ini, pesatnya laju pertumbuhan penduduk dan masifnya industrialisasi dunia meningkatkan konsumsi energi dunia secara drastis dan mengakibatkan tersedotnya cadangan energi, khususnya energi fosil. Keadaan ini juga dialami Indonesia, yang semula merupakan negara pengekspor minyak namun saat ini telah berubah menjadi negara pengimpor minyak (*net-importing country*). Bagi Indonesia, permasalahan potensi kelangkaan pangan dan energi dunia yang tidak diantisipasi oleh kebijakan pangan dan energi yang tepat akan menimbulkan potensi kerawanan sosial politik di Indonesia. Peran diplomasi untuk memperjuangkan kepentingan Indonesia pada dua isu ini perlu dilakukan secara lebih pro-aktif agar sejalan dengan kebijakan nasional dalam bidang pangan dan energi.

Keempat, isu kerusakan lingkungan hidup dapat menjadi ancaman bagi keamanan dan perdamaian dunia mengingat luasnya dampak negatif yang dapat ditimbulkan. Persoalan pembuangan sampah radioaktif, isu air seperti polusi laut, isu udara seperti polusi udara dapat mengancam keamanan nasional dan mengganggu

hubungan antarnegara. Dalam mengatasi persoalan ini, Indonesia perlu mengajak negara-negara tetangga untuk memperkuat kerja sama dalam penanganan pencemaran laut dan udara, serta mencegah kemungkinan terjadinya pembuangan limbah di wilayah perairan kawasan.

Kelima, kemiskinan dan penyakit menular berdampak terhadap keamanan nasional. Pengalaman Indonesia dengan avian influenza dan HIV/AIDS serta penyakit menular dan penyakit baru lainnya merupakan persoalan yang sangat penting bagi pemeliharaan keamanan nasional karena dampak lanjutannya yang sangat panjang, tidak hanya ancaman terhadap eksistensi penduduk, tetapi juga bagi pembangunan ekonomi dan kedaulatan Indonesia. Untuk itu, Indonesia perlu meyakinkan melalui diplomasi bahwa pertukaran informasi dan penanganan berbagai penyakit menular merupakan kepentingan bersama masyarakat internasional, tidak dimonopoli dan disalahgunakan oleh negara tertentu.

Keenam, dengan meningkatnya integrasi ekonomi global, serangan teroris berskala besar akan menimbulkan dampak yang merugikan kesejahteraan jutaan orang di seluruh dunia. Segala bentuk tindakan terorisme, dengan motivasi dan cara apa pun, termasuk aksi bom bunuh diri menjadi ancaman terhadap keamanan dunia termasuk Indonesia. Perkembangan mutakhir menunjukkan bahwa terorisme masih menjadi ancaman keamanan nasional pada masa mendatang. Indonesia secara nyata tidak lagi menjadi negara “sarang teroris”, tetapi telah menjadi negara “korban teroris”. Pandangan seperti ini perlu menjadi dasar bagi setiap keterlibatan Indonesia dalam upaya mengatasi ancaman terorisme global.

Ketujuh, ancaman konflik antarnegara terhadap stabilitas regional dan perdamaian dunia. Perang dan instabilitas politik tidak kunjung mereda di kawasan Timur Tengah dan kecenderungan perkembangan situasi politik dan keamanan di kawasan Afrika dan Asia Selatan berpotensi menyulut radikalisme di berbagai belahan dunia. Persoalan nasionalisme sekular yang kemudian bersinergi dengan paham-paham radikalisme dapat menjadi sumber ancaman baru bagi keamanan internasional. Hal ini akan menjadi lebih berbahaya apabila ancaman itu melibatkan aktor-aktor negara yang memiliki sumber-sumber daya ekonomi dan militer yang kuat. Selain itu, sebagai dampak lanjutan dari isu perang melawan terorisme, juga berkembang diskriminasi dan pelabelan (*profiling* dan *stereotyping*) terhadap kelompok masyarakat tertentu, dengan mengaitkannya dengan radikalisme atau ancaman keamanan lainnya. Hal ini menyebabkan makin terbukanya untuk peluang terjadinya benturan peradaban, yang pada gilirannya akan mengancam keamanan internasional. Untuk merespon kondisi ini, Indonesia perlu meyakinkan dunia internasional untuk menunjukkan bahwa nilai-nilai luhur agama sejalan dengan nilai utama demokrasi.

Kedelapan, ancaman penyebaran senjata nuklir, senjata radiologi, dan senjata kimia serta senjata biologi. Proliferasi nuklir oleh negara meningkatkan kemungkinan tersedianya bahan dan teknologi yang diperlukan oleh teroris untuk memperoleh



senjata nuklir. Potensi aktor negara dalam memperdagangkan teknologi dan bahan nuklir diperkuat oleh lemahnya dan tidak efektifnya pengendalian dan pengamanan di perbatasan. Indonesia mengikuti dengan prihatin perkembangan masalah nuklir di beberapa negara. Tantangan bagi Indonesia adalah bahwa kita harus mengambil sikap konsisten dan tegas terhadap keprihatinan dunia dalam persoalan senjata nuklir, senjata radiologi, senjata kimia, dan senjata biologi.

Diplomasi perbatasan yang terkoordinasi untuk menjaga keutuhan wilayah darat, laut, dan udara Indonesia serta menjaga kekayaan sumber daya alam nasional

Pada dimensi kewilayahan, kejelasan batas wilayah darat dan laut merupakan elemen yang penting dalam upaya memelihara keutuhan dan kesatuan NKRI. Indonesia berbatasan dengan 10 negara tetangga dan sebagian dari perbatasan-perbatasan itu belum disepakati. Indonesia masih memiliki sejumlah agenda politik yang belum tuntas dengan negara-negara di Asia Tenggara yang berbatasan langsung.

Bagi Indonesia sendiri, dialog dan perundingan untuk menyelesaikan masalah perbatasan ini merupakan hal yang sangat penting untuk dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip kedaulatan nasional dan integritas wilayah. Indonesia berkeinginan mempercepat proses dialog untuk isu perbatasan ini, sehingga dapat diselesaikan dalam waktu yang secepatnya. Namun, permasalahannya adalah bahwa proses dialog membutuhkan kesediaan kedua belah pihak yang akan berunding sehingga inisiatif Indonesia membutuhkan metode dan pendekatan yang spesifik dalam implementasinya untuk dapat memicu keinginan yang sama dari negara tetangga. Di samping permasalahan tersebut, Indonesia juga belum memiliki kebijakan maritim (*ocean policy*) yang komprehensif yang dapat digunakan sebagai landasan kebijakan dalam setiap perundingan masalah perbatasan laut dan pengelolaan kawasan laut. Semua persoalan tersebut memperlambat proses perundingan perbatasan dengan negara-negara tetangga.

Peningkatan Pelayanan dan Perlindungan WNI/BHI di Luar Negeri

Pelayanan dan perlindungan WNI/BHI di luar negeri menghadapi sejumlah permasalahan dalam hal keterbatasan penampungan, tidak memadainya bantuan dan advokasi hukum, serta keterbatasan fasilitasi pemulangan. Di samping itu, hingga saat ini pemerintah belum memiliki data pasti WNI mengenai bermasalah di luar negeri. Hingga kini, masih banyak TKI ilegal yang belum tertangani, masih terjadinya deportasi terhadap WNI, masih banyaknya tindak kekerasan terhadap TKI, dan masih tidak disiplinnya PJTKI dalam penanganan TKI di luar negeri.

Hal lain, penanganan persoalan hukum di luar negeri ini membutuhkan waktu

yang cukup lama mengingat perlunya memperhatikan tidak hanya hukum nasional, tetapi juga hukum negara bersangkutan.

Peningkatan Peran Indonesia Dalam Pemajuan Demokrasi, HAM, Lingkungan Hidup, dan Perlindungan Budaya

Dengan perkembangan demokrasi yang diraih hingga saat ini, Indonesia memiliki potensi untuk menjadi promotor baru perkembangan demokrasi di dunia internasional, khususnya di kawasan Asia dan Afrika. Pada kedua kawasan ini Indonesia memiliki landasan hubungan politik yang kuat, baik pada tataran bilateral maupun regional. Namun, tantangan pada masa mendatang bagi Indonesia adalah menjaga dan memelihara dinamika demokrasi yang telah dicapai saat ini sebagai modalitas yang kuat dalam melaksanakan peran positif Indonesia di fora internasional.

Dalam kaitan dengan persoalan HAM, Indonesia belum terbebas dari dugaan kasus-kasus pelanggaran HAM yang penanganannya dianggap belum tuntas oleh masyarakat internasional, seperti tuduhan pelanggaran HAM di Timor-Timur tahun 1999. Di samping itu isu-isu khusus, seperti kasus Munir, Ahmadiyah, dan impunitas masih terus mewarnai keprihatinan masyarakat internasional terhadap situasi HAM di Indonesia. Harmonisasi antara Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dengan berbagai perjanjian HAM yang telah diratifikasi menjadi tantangan ke depan yang perlu segera direspon secara nasional. Tantangan pula bagi Indonesia untuk melakukan kajian untuk selanjutnya meratifikasi konvensi-konvensi yang belum diratifikasi beserta protokol-protokol tambahannya. Hal ini dapat meningkatkan kepercayaan dunia internasional terhadap komitmen Indonesia dalam perlindungan dan promosi HAM, sekaligus dapat menjadi nilai tawar yang tinggi bagi Indonesia dalam diplomasi di dunia internasional.

Terkait dengan berakhirnya keanggotaan Indonesia di Dewan HAM pada tahun 2010, terdapat kepentingan bagi Indonesia untuk dapat terpilih kembali pada pencalonan keanggotaan Dewan HAM untuk periode 2011 – 2013 dimana dalam periode tersebut akan dilaksanakan *review* terhadap Dewan HAM. Lebih lanjut, Indonesia pada tahun 2012 akan menyampaikan laporan dibawah mekanisme UPR antara lain untuk menyampaikan perkembangan implementasi berbagai rekomendasi yang disampaikan Pokja UPR pada tahun 2008.

Berkenaan dengan hubungan Indonesia-Timor Leste, masih terdapat sejumlah ganjalan, tetapi setelah penerimaan Laporan Akhir Komisi Kebenaran dan Persahabatan (KKP) RI – Timor Leste oleh para pemimpin kedua negara, berbagai agenda baru membentang di depan untuk meningkatkan kualitas hubungan diplomatik kedua negara. Sebagai negara yang secara geografis berbatasan langsung, ditambah lagi dengan adanya fondasi historis hubungan kedua negara, Indonesia perlu mendorong dan mengambil inisiatif yang diperlukan guna merampungkan *plan of action* sebagai



bagian dari rekomendasi-rekomendasi Laporan Akhir KKP.

Dalam konteks implementasi rekomendasi Laporan Akhir KKP ini, masih terdapat banyak isu krusial yang berpotensi mengganggu hubungan bilateral kedua negara jika tidak ditangani dengan serius dan hati-hati. Sebagai gambaran, rekomendasi untuk akuntabilitas dan reformasi kelembagaan menyebutkan bahwa secara formal, komisi tidak merekomendasikan untuk memberikan amnesti dan rehabilitasi kepada individu atau kelompok orang yang berperan dan terlibat dalam kasus-kasus di masa lalu. Sementara itu, rekomendasi untuk kebijakan perbatasan dan keamanan bersama, antara lain disebutkan tentang pembentukan suatu “Zona Damai Bebas Visa” di perbatasan Timor Leste dan wilayah Indonesia (daerah Timor Barat).

Dalam hal pelestarian lingkungan hidup, salah satu permasalahan dalam kerja sama internasional adalah belum adanya koherensi dalam perlindungan lingkungan. Pada umumnya, penanganan masalah perubahan iklim, penggundulan hutan dan pengurusan belum berjalan efektif. Perjanjian-perjanjian multilateral mengenai lingkungan di tingkat regional dan global terbentur oleh kurang memadainya tingkat implementasi dan pelaksanaannya oleh negara-negara anggota. Dalam kasus Indonesia, persoalan lingkungan seperti kebakaran hutan (asap) dan eksplorasi sumber daya alam sangat riskan terhadap keharmonisan hubungan antanegara, terutama dengan negara tetangga. Indonesia diharapkan mampu menjadi pemain utama yang aktif dalam isu proteksi lingkungan hidup dan perubahan iklim termasuk aspek kelautannya.

Norma dan aturan internasional yang masih terbatas juga menjadi persoalan bagi diplomasi Indonesia di dunia internasional, terutama dalam hal perlindungan terhadap kekayaan budaya. Hingga kini, belum tersedia rejim internasional yang mengatur perlindungan kekayaan budaya, sebab hal itu dianggap sebagai warisan umat manusia yang tidak dapat diklaim sebagai milik kelompok tertentu. Di lain pihak, Indonesia seringkali menjadi pihak yang dirugikan akibat adanya klaim negara lain terhadap kekayaan budaya Indonesia. Di sisi lain, beberapa entitas di dalam negeri, terutama pemerintah daerah, seringkali salah kaprah dalam melindungi kekayaan budaya tersebut, misalnya mengajukan hak paten terhadap suatu *item* kebudayaan. Sementara itu, rezim internasional yang mengatur tentang paten memiliki batas waktu justru dapat mengancam Indonesia kehilangan kekayaan budaya secara permanen setelah masa paten tersebut berakhir. Untuk itu, Indonesia perlu terus melanjutkan diplomasi multilateral untuk mempercepat terbentuknya rezim internasional yang dapat memberikan perlindungan bagi kekayaan nasional Indonesia dalam kerangka *genetic resources, traditional knowledge, and folklore* (GRTKF) sebagaimana telah diperjuangkan beberapa tahun terakhir ini. Hal lain, aturan hukum yang mengatur tentang GRTKF di tingkat nasional perlu mendapatkan perhatian.

Kemitraan Strategis di Kawasan Asia Pasifik dan Afrika, serta Kawasan Amerika dan Eropa

Permasalahan yang senantiasa perlu mendapat perhatian adalah seberapa signifikan kemitraan strategis bagi pencapaian kepentingan nasional Indonesia, dan keuntungan politik internasional yang dapat diraih dengan menjalin kemitraan strategis.

Persoalan penting yang dihadapi dalam kaitannya dengan kemitraan strategis adalah belum dirampungkannya Rancangan *Plan of Action* (PoA) dari berbagai kesepakatan, baik dalam kerangka bilateral maupun intraregional. Pemerintah Indonesia saat ini sedang menyelesaikan pembahasan *Plan of Action* dari *Strategic Partnership* dengan Amerika Serikat. Selain itu, masih terdapat serangkaian kesepakatan kemitraan strategis yang juga perlu mendapatkan perhatian serius, misalnya rancangan PoA Deklarasi Kemitraan Strategis RI-RRC, dan rancangan PoA Deklarasi Kemitraan Komprehensif RI-Vietnam, implementasi kemitraan strategis RI- Korea Selatan, dan realisasi kemitraan strategis RI-Brazil yang telah sampai pada tahap *memorandum of understanding* antara kedua negara. Sementara itu, pada tataran intrakawasan, kemitraan strategis yang telah disepakati antara-negara Asia dan Afrika melalui NAASP juga perlu mendapatkan tindak lanjut.

Dalam kaitannya dengan peningkatan pasar dan produk-produk manufaktur, Indonesia menghadapi para kompetitor yang cukup tangguh di berbagai kawasan di dunia, baik di kawasan yang merupakan pasar tradisional maupun pasar nontradisional. Dewasa ini, kemajuan ekonomi India, China, dan Korea telah menjadikan negara-negara tersebut sebagai pemain utama dalam ekonomi dunia. Di lapisan kedua, terdapat negara-negara di Asia Tenggara, seperti Malaysia, Thailand, dan Vietnam yang secara aktif terus mengembangkan pasar dan produk-produk mereka dan menjadi kompetitor bagi produk-produk Indonesia. Kawasan yang potensial menjadi pasar nontradisional bagi produk-produk Indonesia adalah Afrika, dan Eropa Timur dan Tengah. Dengan kedua kawasan ini, Indonesia mempunyai hubungan politik yang sangat erat, yang merupakan bagian dari hubungan historis dan berkembang menjadi hubungan emosional. Kuatnya hubungan politik ini seharusnya dapat dikembangkan dan dimanfaatkan untuk menjadi hubungan ekonomi yang lebih produktif dan menguntungkan bagi Indonesia dan menjadi tantangan yang perlu direalisasikan untuk membuka pasar bagi Indonesia.

Dalam upaya meningkatkan pasar nontradisional ke Afrika, permasalahan yang dihadapi adalah potensi ekonomi dan investasi Indonesia kurang dikenal luas oleh para pengusaha Afrika akibat relatif rendahnya hubungan antarmasyarakat (*people to people interactions*), dan relatif lemahnya promosi potensi Indonesia di negara-negara Afrika. Pengusaha Afrika pun masih memiliki pengetahuan yang terbatas mengenai mekanisme-mekanisme teknis perdagangan internasional. Di sisi lain, para pengusaha Indonesia masih banyak yang menganggap Afrika sebagai citra *underdeveloped countries*, rawan konflik dan identik dengan penyakit, kemiskinan, dan kelaparan sehingga tidak melakukan kerja sama ekonomi dengan negara-negara Afrika.



Peningkatan kerja sama ekonomi dan perdagangan dengan negara-negara di kawasan Asia Selatan dan Tengah masih terkendala oleh belum tuntasnya beberapa perjanjian perdagangan yang berakibat pada pemberlakuan bea masuk yang tinggi terhadap produk Indonesia. Status perjanjian perdagangan antara RI-Uzbekistan dan RI-Pakistan belum diratifikasi oleh Indonesia. Negara-negara seperti Uzbekistan, Kyrgyzstan, Turkmenistan, Azerbaijan, Afganistan dan Kazakhstan merupakan *land locked countries* yang tidak memiliki pelabuhan pantai sehingga arus barang sangat bergantung pada transportasi darat. Letak negara-negara Asia Tengah yang jauh dan prosedur dengan pengiriman yang rumit menyebabkan produk Indonesia yang dipasarkan di kawasan tersebut berbiaya tinggi. Untuk menekan biaya tinggi tersebut dapat ditempuh dengan pengurangan bea masuk dengan perjanjian perdagangan dan perdagangan langsung tanpa pihak ketiga melalui kegiatan promosi atau pameran. Pemerintah Pakistan memberikan status *dumping* terhadap produk-produk Indonesia. Perdagangan fiktif oleh perusahaan di Indonesia memberikan kontribusi citra negatif perusahaan Indonesia.

Di samping itu, krisis ekonomi global yang mempengaruhi perkembangan politik, ekonomi, dan sosial budaya di semua kawasan termasuk Asia Selatan dan kawasan lainnya berakibat pada rendahnya pertumbuhan ekonomi, menurunnya daya beli, dan kegiatan perdagangan, investasi dan wisata. Kondisi tersebut akan berdampak pada penurunan perdagangan luar negeri termasuk permintaan terhadap produk-produk Indonesia. Dengan kondisi demikian, sangat berat bagi Indonesia untuk menjalankan strategi diplomasi ekonomi yang dapat memasarkan produk Indonesia.

Sementara itu, kerja sama FEALAC yang pada awalnya dinilai cenderung berkembang perlahan karena faktor geografis yang jauh dari Indonesia, tetapi dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan perkembangan yang lebih maju. Setelah melihat signifikansi kerja sama FEALAC yang semakin besar, Indonesia perlu terus mengali potensi kerja sama dengan negara-negara mitra FEALAC, baik dari kawasan Asia yang merupakan mitra tradisional, maupun dari kawasan Amerika Latin yang masih menyimpan banyak peluang bagi Indonesia.

Berkaitan dengan kerja sama ASEM, demi perkembangan forum, Indonesia akan terus memberikan partisipasi aktif dalam tiap inisiatif kegiatan yang diadakan oleh para mitra ASEM. Melalui partisipasi tersebut diharapkan Indonesia akan dapat membuka peluang-peluang yang ada dalam proses ASEM, terutama dalam bidang-bidang kerja sama konkrit yang akan memberikan keuntungan bagi proses pembangunan dalam negeri.

Pemerintah Indonesia belum memiliki pedoman yang komprehensif yang dapat digunakan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dapat dijadikan acuan dalam membuat perjanjian dengan pihak asing. Hal ini menjadi penting sebab BUMN merupakan institusi yang memiliki dua sisi, yaitu sisi publik dan sisi privat. Keunikan ini menyebabkan terjadinya wilayah abu-abu pada perjanjian bisnis yang dibuat oleh

BUMN, dan hal ini perlu diperjelas dengan pedoman yang dapat diaplikasikan.

Peningkatan Pelaksanaan Diplomasi Ekonomi

Krisis keuangan saat ini merupakan ancaman terhadap pencapaian *Millenium Development Goals* (MDGs), bahkan berpotensi menyebabkan kemunduran atas berbagai kemajuan yang telah dicapai sebelumnya. Bagi Indonesia, apabila hal tersebut tidak dapat diatasi dengan baik, pencapaian MDGs dikhawatirkan tidak akan dapat tercapai pada tahun 2015.

Krisis keuangan dan ekonomi juga telah menimbulkan dampak negatif terhadap arus perdagangan global. Hal ini ditandai dengan munculnya berbagai kebijakan perdagangan yang proteksionistis sehingga mengancam sistem perdagangan multilateral *World Trade Organization* (WTO) yang berdasarkan pada aturan (*rules-based multilateral trading system*). Dalam kaitan ini, diplomasi Indonesia terus diarahkan pada upaya untuk mendorong segera tercapainya kesepakatan dalam perundingan Agenda Pembangunan Doha WTO yang dapat memperluas akses pasar bagi produk Indonesia dan tetap mengedepankan kepentingan pembangunan negara berkembang.

Di samping itu, berlarut-larutnya perundingan perdagangan multilateral dalam kerangka WTO telah mendorong tumbuh pesatnya *free trade agreement* (FTA) baik dalam kerangka bilateral maupun regional. Selain memiliki potensi manfaat ekonomis yang besar, FTA juga mengandung kerawanan yang dapat merugikan kepentingan Indonesia di bidang perdagangan antarnegara apabila tidak memiliki kesiapan yang cukup. Untuk itu, diperlukan kesiapan dan penguatan diplomasi ekonomi dan perdagangan guna dapat melakukan perundingan berbagai FTA sehingga dapat memberikan kontribusi positif bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Di samping itu, tantangan ke depan bagi Indonesia adalah terus memperjuangkan hak agar diterimanya fleksibilitas "*Special Products*" (SPs) dan "*Special Safeguard Mechanism*" (SSM) bagi negara berkembang.

Peran Serta Indonesia dalam Kerja Sama Selatan-Selatan (KSS)

Salah satu permasalahan dalam diplomasi Indonesia melalui bantuan teknik adalah belum adanya desain nasional yang komprehensif untuk menjamin sinergi antara berbagai instansi terkait dalam pelaksanaan KSS. Indonesia juga belum mempunyai entitas yang kuat untuk menangani KSS yang mampu melaksanakan koordinasi secara terpadu. Sebagai perbandingan, Thailand, Malaysia, Turki, Chile, Korea, dan Jepang telah memiliki entitas yang cukup kuat dan solid dalam penanganan KSS. Selain itu, tantangan ke depan adalah pentingnya untuk mengidentifikasi potensi keunggulan yang dimiliki oleh Indonesia serta menetapkan prioritas bidang-bidang



yang dapat dikerja samakan dalam kerangka KSS. Indonesia juga perlu mengoptimalkan pemanfaatan keberadaan *South-South Centers of Excellence* seperti *Non Aligned Movement for South-South Technical Cooperation* untuk pelaksanaan program KSS Indonesia.

Terkait dengan perubahan pergeseran dalam karakter dan orientasi hubungan antara negara maju dan berkembang, terdapat kecenderungan pada negara-negara maju menempatkan negara berkembang tidak lagi sebagai klien, tetapi sebagai mitra setara. Dalam situasi demikian posisi Indonesia sebagai negara berkembang akan semakin sulit untuk mendapatkan dukungan pembiayaan dari negara maju terhadap KSS dalam bentuk *triangular cooperation*. Indonesia dituntut untuk lebih kreatif dalam mendesain program-program KSS-nya dengan memperhatikan keinginan pihak donor tanpa perlu mengorbankan kepentingan negara berkembang.

6.2.2.2 Sasaran Pembangunan

Sasaran subbidang politik luar negeri adalah meningkatnya kualitas diplomasi Indonesia yang dapat dilihat dari hal-hal sebagai berikut:

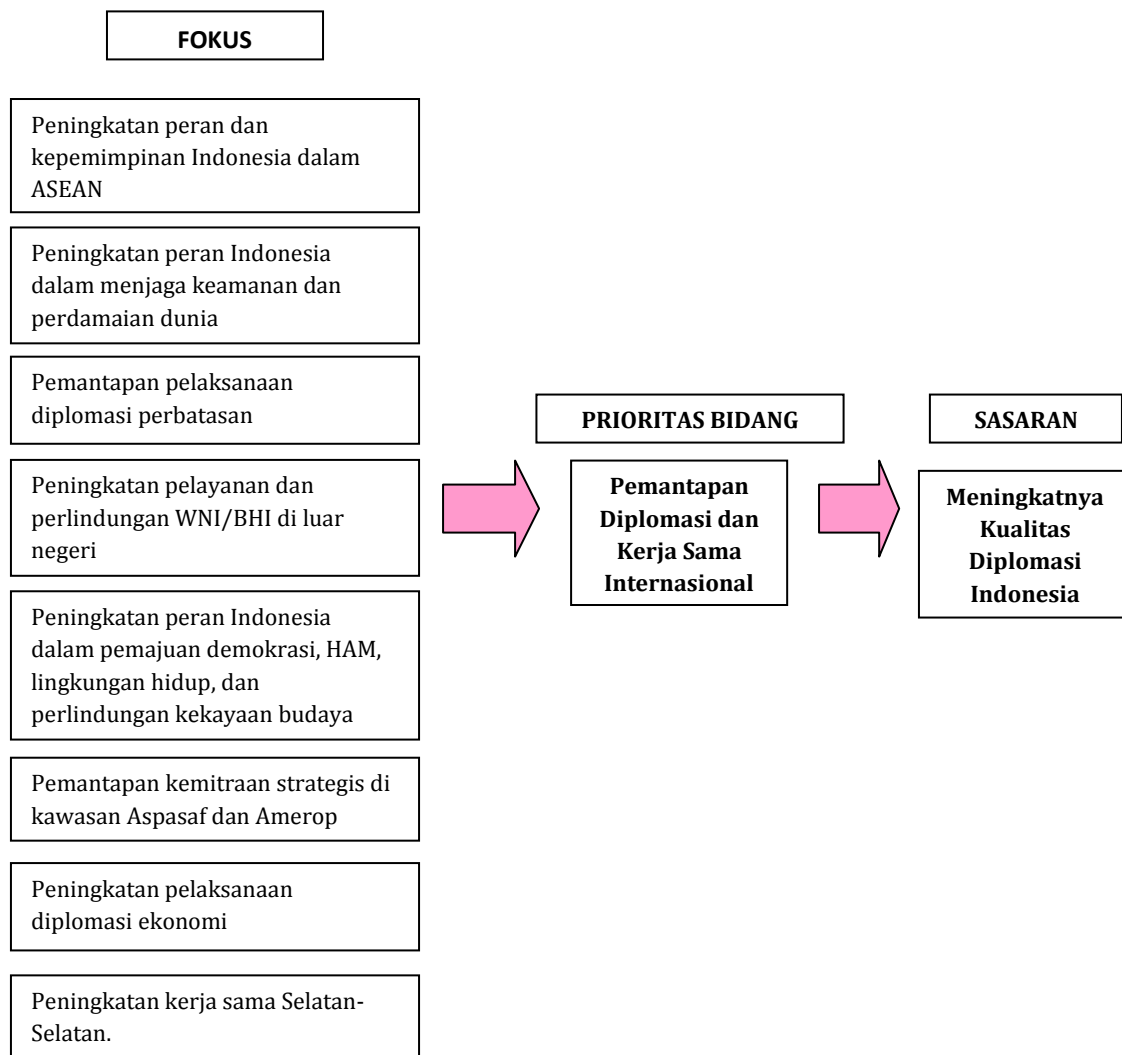
1. meningkatnya peran dan kepemimpinan Indonesia dalam kerja sama ASEAN dengan indikator diadopsinya prakarsa dan gagasan Indonesia untuk mendorong pelaksanaan rencana aksi pembentukan komunitas ASEAN;
2. meningkatnya peran Indonesia untuk turut menjaga keamanan nasional dan menciptakan perdamaian dunia yang ditandai dengan partisipasi aktif Indonesia dalam mendorong reformasi DK PBB;
3. meningkatnya kinerja diplomasi perbatasan yang ditandai dengan terselesaikannya secara bertahap permasalahan perbatasan;
4. meningkatnya pelayanan dan perlindungan WNI dan BHI, dengan indikator terlindunginya 14.998 orang WNI bermasalah di luar negeri pada akhir tahun 2014;
5. meningkatnya citra Indonesia di dunia internasional dalam pemajuan demokrasi, HAM, lingkungan hidup, dan perlindungan budaya yang ditandai dengan diterimanya Indonesia secara meluas sebagai negara demokratis yang menghormati HAM dan memberikan perhatian terhadap masalah lingkungan hidup, serta partisipasi aktif Indonesia untuk mempercepat pembentukan rezim internasional yang dapat memberikan perlindungan kekayaan nasional Indonesia;
6. terwujudnya perluasan akses dan meningkatnya kerja sama bilateral dan regional di bidang ekonomi, perdagangan, investasi, dan pariwisata khususnya di kawasan Afrika, Eropa Tengah dan Timur, yang ditandai dengan terbukanya peluang dan potensi perluasan pasar nontradisional di kedua kawasan tersebut;

7. meningkatnya peran diplomasi ekonomi Indonesia dalam forum multilateral, dengan indikator partisipasi aktif Indonesia dalam memperjuangkan kepentingan Indonesia dan negara berkembang;
8. meningkatnya kerja sama Selatan Selatan yang ditandai dengan semakin kuatnya dukungan negara-negara Selatan terhadap kebijakan politik luar negeri Indonesia.

6.2.3 Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan

Dalam mencapai sasaran pembangunan, prioritas sub bidang politik luar negeri adalah Peningkatan Diplomasi dan Kerja sama Internasional, dengan fokus prioritas: (1) Peningkatan peran dan kepemimpinan Indonesia dalam ASEAN; (2) Peningkatan peran Indonesia dalam menjaga keamanan dan perdamaian dunia; (3) Pemantapan pelaksanaan diplomasi perbatasan; (4) Peningkatan pelayanan dan perlindungan WNI/BHI di luar negeri; (5) Peningkatan Peran Indonesia dalam pemajuan Demokrasi, HAM, Lingkungan Hidup, dan Perlindungan Kekayaan Budaya; (6) Pemantapan kemitraan strategis di kawasan Aspasaf dan Amerop; (7) Peningkatan pelaksanaan diplomasi ekonomi; dan (8) Peningkatan kerja sama Selatan-Selatan. Berdasarkan prioritas bidang dan fokus prioritas tersebut, maka kerangka pikir dari RPJMN 2010-2014 dapat digambarkan sebagai berikut:

Bagan 6.2 Kerangka Berpikir Subbidang Politik Luar Negeri



Berdasarkan atas kerangka pikir di atas, arah kebijakan pembangunan subbidang politik luar negeri adalah sebagai berikut:

- 1. Meningkatkan peran dan kepemimpinan Indonesia dalam ASEAN dan pembentukan Komunitas ASEAN 2015**

Upaya untuk menciptakan peran dan kepemimpinan Indonesia dalam ASEAN khususnya dalam perwujudan komunitas ASEAN pada tahun 2015 dilakukan melalui antara lain:

- a. **Penyusunan dan pelaksanaan *grand design* komunitas ASEAN** akan digunakan untuk memperkenalkan rencana aksi Piagam ASEAN dan mendorong komitmen seluruh pemangku kepentingan di tanah air untuk melaksanakan rencana aksi di bidang ekonomi, politik dan keamanan, serta sosial dan budaya. Dukungan pemangku kepentingan dalam negeri akan membantu mendorong peran dan kepemimpinan Indonesia di ASEAN.

Dengan posisi yang akan dijabat sebagai Ketua ASEAN pada tahun 2013, dukungan untuk mempersiapkan kinerja Indonesia perlu mendapatkan perhatian yang sungguh-sungguh.

- b. **Peningkatan koordinasi teknis dan pelaksanaan sosialisasi cetak biru ASEAN** Peran dan kepemimpinan Indonesia di ASEAN ditentukan pula oleh konsistensi Indonesia melaksanakan cetak biru ASEAN. Untuk itu, koordinasi teknis di antara departemen teknis dan dengan pemerintah daerah untuk mengintegrasikan cetak biru ke dalam hukum nasional dan melaksanakannya merupakan keniscayaan. Di samping itu, sosialisasi perlu dilakukan untuk meningkatkan komitmen pemangku kepentingan dalam negeri, baik itu pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun masyarakat. Adanya komitmen dan dukungan pemerintah pusat dan daerah terutama dalam pembangunan akan membantu memperkecil kesenjangan pembangunan dengan negara anggota ASEAN lainnya.
- c. **Partisipasi aktif Indonesia dalam setiap forum ASEAN**

Partisipasi aktif Indonesia diperlukan untuk memelihara dan meningkatkan kepercayaan, menunjukkan komitmen, dan memenangkan pertarungan gagasan untuk mendorong ASEAN berjalan ke arah yang dikehendaki bersama.

2. **Meningkatkan peran Indonesia untuk turut menjaga keamanan nasional dan menciptakan perdamaian dunia**

Upaya untuk meningkatkan peran Indonesia dalam menjaga keamanan nasional dan perdamaian dunia dilaksanakan melalui antara lain:

- a. **Partisipasi aktif untuk memenangkan gagasan dan prakarsa dalam forum PBB** mendorong reformasi Dewan Keamanan PBB. Penegasan sikap politik Indonesia yang bebas dan aktif dalam forum internasional perlu dilaksanakan secara konsisten dalam setiap penanganan isu keamanan dan perdamaian dunia, termasuk upaya perdamaian di kawasan Timur Tengah.

- b. **Partisipasi Indonesia dalam pertemuan dan pelaksanaan kerja sama internasional** membahas penanganan senjata pemusnah massal dan senjata konvensional, penanggulangan kejahatan lintas negara dan terorisme. Indonesia perlu mendorong dan aktif melakukan internasionalisasi kejahatan lintas negara dalam setiap forum internasional.

Partisipasi Indonesia dalam berbagai forum internasional dan fasilitasi pelaksanaan kerja sama internasional membahas dan menangani isu-isu nonkeamanan, seperti pangan, energi, lingkungan, kesehatan, dan krisis finansial global. Khusus yang terkait dengan isu kesehatan HIV/AIDS, inisiatif diplomasi Indonesia perlu diarahkan untuk mendapatkan *access and benefit sharing* (ABS) agar Indonesia tidak hanya sekadar menjadi pasar bagi industri farmasi, tetapi ikut mendapatkan pembagian yang adil karena memiliki virus strain.
 - c. **Pelaksanaan diplomasi dan fasilitasi kerja sama internasional** dilakukan untuk mendukung integritas dan keutuhan wilayah Indonesia dan pengamanan sumber daya alam Indonesia.
 - d. **Fasilitasi, koordinasi, dan kerja sama dengan negara asal migran** dilakukan untuk menangani masalah migrasi warga yang disebabkan oleh masalah konflik internal dan instabilitas politik yang terjadi di negara asal migran.
 - e. **Pelaksanaan diplomasi publik**, seperti melalui kegiatan *interfaith dialog* dilakukan untuk mengurangi prasangka antarperadaban.
3. **Meningkatkan kinerja diplomasi perbatasan**

Upaya untuk meningkatkan kinerja diplomasi perbatasan dilakukan melalui antara lain:
 - a. **Pelaksanaan perundingan perbatasan dengan negara tetangga** dengan penekanan pada batas wilayah, landas kontinen dan zona ekonomi eksklusif;

Percepatan penyelesaian isu yang memungkinkan dapat diselesaikan terkait dengan perundingan batas laut dengan Malaysia, Singapura, Filipina, Vietnam, dan memulai perundingan intensif dengan Palau, serta penyelesaian perundingan batas darat dengan Timor Leste.
 - b. **Fasilitasi penyusunan *ocean policy*** dapat menjadi acuan landasan kebijakan dalam setiap perundingan masalah perbatasan laut dan pengelolaan kawasan laut. Penguatan hukum nasional menjadi penting sebagai landasan bagi perundingan masalah perbatasan dengan negara bilateral.
 4. **Meningkatkan kualitas pelayanan dan perlindungan terhadap WNI/BHI di luar negeri**

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan perlindungan WNI/BHI dilakukan melalui antara lain:

a. **Penguatan *citizen services* di 24 perwakilan**

Penguatan *citizen services* akan meningkatkan pemberian fasilitasi penampungan, repatriasi, deportasi, serta bantuan dan advokasi hukum terhadap WNI/BHI bermasalah;

b. **Fasilitasi kerja sama dengan negara tujuan WNI**

Sejumlah pertemuan dengan negara-negara tujuan dilaksanakan untuk mempererat kerja sama dalam mengatasi permasalahan dan menjamin perlindungan WNI di luar negeri dengan lebih pasti.

c. **Koordinasi teknis dengan instansi dan pemerintah daerah**

terkait untuk membenahi sektor hulu dalam mata rantai pengiriman tenaga kerja ke luar negeri. Kurangnya koordinasi dan sinergi bagi upaya penanganan WNI/BHI di luar negeri dipengaruhi oleh kinerja instansi terkait di dalam negeri terutama dalam memproses persiapan dan perekrutan calon tenaga kerja yang kerap tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 39 tahun 2004 sehingga menimbulkan TKI bermasalah (*illegal/undocumented* atau *non-procedural*).

Koordinasi teknik dengan instansi dan pemerintah daerah akan sangat membantu efektivitas sosialisasi tentang pentingnya pelayanan dan perlindungan TKI di luar negeri.

5. **Meningkatkan citra positif Indonesia melalui pemajuan demokrasi, HAM, lingkungan hidup, dan perlindungan kekayaan budaya.**

Upaya untuk meningkatkan citra positif dalam pemajuan demokrasi dan HAM, dan perlindungan kekayaan budaya dilaksanakan melalui antara lain:

a. **Pelaksanaan peran Indonesia untuk mendorong demokratisasi di Asia**

antara lain melalui pelaksanaan kegiatan Bali Democracy Forum (BDF) secara rutin sebagai upaya penyebarluasan citra positif tentang Indonesia kepada dunia internasional dan sebagai kerangka saling tukar pengalaman mengenai implementasi demokrasi di tiap-tiap negara peserta;

b. **Partisipasi Indonesia dalam pertemuan internasional untuk pemajuan HAM, dan pelestarian lingkungan hidup, serta memperjuangkan adopsi perlindungan terhadap *genetic resources, traditional knowledge, dan folklore (GRTKF)* sebagai bagian dari rejim internasional, yang dapat memberikan jaminan bagi pemanfaatan kekayaan budaya dan kekayaan tradisional Indonesia;**

- c. **Fasilitasi dan kerja sama dengan Timor Leste untuk melaksanakan rencana aksi Komisi Kebenaran dan Persahabatan.** Pelaksanaan rencana aksi terkendala oleh belum rampungnya dokumen rencana tindak yang perlu disepakati oleh kedua belah pihak, dan ketidaksiapan pihak Timor Leste. Untuk itu, dorongan, fasilitasi, dan kerja sama perlu segera dilaksanakan.
6. **Memantapkan kemitraan strategis di kawasan Aspasaf dan Amerop**, yang dilakukan melalui antara lain:

- a. **Fasilitasi promosi perdagangan dan investasi** untuk membuka, memperluas, dan mencari peluang pasar non-tradisional baru seperti Rusia, negara-negara di Eropa Timur dan Tengah, Asia Selatan, Afrika dan Amerika Latin.

Fasilitasi promosi dan perdagangan perlu didukung oleh upaya pemahaman pelaku usaha, baik dari Indonesia maupun pengusaha dari negara-negara di kawasan Eropa Timur dan Tengah, Asia Selatan, Afrika dan Amerika Latin mengenai potensi dan peluang-peluang pasar non tradisional.

Upaya fasilitasi promosi pariwisata Indonesia perlu didukung dan diperkuat pula melalui berbagai cara-cara inovatif dan strategis. Kerja sama dengan berbagai pihak perlu dilakukan sebagai salah satu upaya strategis yang efisien dan efektif.

- b. **Peningkatan peran aktif Indonesia dalam kerja sama regional**, khususnya di kawasan Asia Pasifik dan Afrika, serta Amerika dan Eropa, terutama dalam kerangka *Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC)*, *ASEAN Regional Forum (ARF)*, *Southwest Pacific Dialogue (SwPD)*, *New Asian African Strategic Partnership (NAASP)*, *Coral Triangle Initiative on Coral Reefs, Fisheries and Food Security (CTI-CFF)*, *Asia Cooperation Dialogue (ACD)*, *Asia Middle-East Dialogue (AMED)*, *Indian Ocean Rim Association for Regional Cooperation (IOR-ARC)*, *ASEM* dan *FEALAC* serta kerja sama subregional seperti *Brunei Darussalam – Indonesia – Malaysia – Philippines East ASEAN Growth Area (BIMP-EAGA)* dan *Indonesia – Malaysia – Thailand Growth Triangle (IMT-GT)*. Melalui partisipasi tersebut, diharapkan Indonesia dapat membuka peluang-peluang yang ada terutama dalam bidang kerja sama konkret yang memberikan keuntungan bagi proses pembangunan nasional.
- c. **Penyelesaian Rencana Aksi berbagai kesepakatan.** Indonesia telah melakukan penandatanganan kerja sama dengan negara-negara sahabat di berbagai bidang. Namun, realisasinya terkendala oleh belum tuntasnya rancangan Rencana Aksi. Untuk itu, perlu dorongan dan fasilitasi penyelesaian dan pelaksanaan rencana kerja sama baik dalam kerangka

bilateral maupun regional untuk kepentingan Indonesia agar realisasi kerja sama tersebut dapat dirasakan manfaatnya.

7. **Meningkatkan kualitas diplomasi ekonomi** dalam forum multilateral yang dilakukan melalui antara lain: partisipasi aktif Indonesia dalam forum multilateral seperti WTO, APEC, G-20, G-33 untuk memperjuangkan kepentingan Indonesia dan negara berkembang. Prakarsa dan gagasan Indonesia perlu diperjuangkan dalam setiap pertemuan.
8. **Meningkatkan kerja sama Selatan-Selatan, yang dilakukan melalui pengembangan kerja sama Selatan-Selatan.** Kerja sama Selatan-Selatan (KSS) perlu dikembangkan untuk saling membantu mewujudkan kemandirian, mempercepat pembangunan, serta menguatkan solidaritas antar negara berkembang. Bagi negara berkembang, mekanisme KSS dapat dijadikan alat untuk meningkatkan posisi tawar dalam berhubungan dengan negara maju. Negara-negara berkembang perlu secara aktif mengidentifikasi berbagai keunggulan pada masing-masing negara untuk disinergikan sebagai kekuatan bersama.

Indonesia bertekad untuk menjadikan bantuan teknik sebagai alat diplomasi, terutama dalam hubungan dengan negara-negara berkembang di Pasifik dan Afrika. Dalam bidang bantuan teknis ini, Indonesia dapat membagikan keunggulan melalui peningkatan kapasitas pelatihan dalam bidang pertanian, pemberian bantuan peralatan secara langsung, dan melalui hubungan transfer keterampilan dan pengetahuan.

Dalam membantu kelancaran pengembangan kerja sama Selatan-Selatan, Indonesia perlu memperkuat entitas kelembagaan sehingga mampu mengordinasikan pelaksanaan pengembangan KSS secara terpadu, dan mampu memfasilitasi upaya identifikasi potensi keunggulan yang dimiliki oleh Indonesia yang dapat dikerja samakan dalam kerangka KSS.

**RENCANA TINDAK PRORITAS BIDANG
POLITIK DALAM NEGERI DAN KOMUNIKASI**

SUB BIDANG PEMBANGUNAN : POLITIK DALAM NEGERI DAN KOMUNIKASI
 PRIORITAS SUB BIDANG : PELEMBAGAAN DEMOKRASI

NO	FOKUS PRIORITAS /KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010 - 2014 (Rp. Miliar)1)
				2010	2014			
FOKUS PRIORITAS								
I	PENINGKATAN AKUNTABILITAS LEMBAGA DEMOKRASI	Terwujudnya akuntabilitas lembaga demokrasi termasuk akuntabilitas peran masyarakat sipil dan organisasi masyarakat sipil, peran parpol, penyelenggara pemilu, dan lembaga penyelenggara negara lainnya, serta terlaksananya pemilu 2014 yang adil dan demokratis Terwujudnya akuntabilitas OMS	Indeks kinerja lembaga demokrasi (melalui Indeks Demokrasi Indonesia/IDI) Tingkat kesehatan masyarakat sipil (melalui Indeks Kesehatan Masyarakat Sipil)	52,3 *)	70			618,5
				-	3			

SUB BIDANG PEMBANGUNAN : POLITIK DALAM NEGERI DAN KOMUNIKASI
 PRIORITAS SUB BIDANG : PELEMBAGAAN DEMOKRASI

NO	FOKUS PRIORITAS /KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010 - 2014 (Rp. Miliar)1)
				2010	2014			
KEGIATAN PRIORITAS								
1.1	Fasilitasi organisasi politik dan kemasyarakatan	Terlaksananya penyusunan kebijakan, fasilitasi dan dukungan bagi peningkatan peran organisasi politik dan kemasyarakatan	% kemajuan rancangan revisi terbatas UU Parpol Jumlah parpol yang mendapatkan fasilitasi peningkatan kapasitas Jumlah dokumen Indeks Kesehatan Masyarakat Sipil Jumlah organisasi kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan kapasitas % kemajuan rancangan revisi UU No. 8 tahun 1985 tentang Ormas % kemajuan penyusunan rumusan kebijakan, perbaikan mekanisme dan prosedur penyelenggaraan kebijakan publik yang melibatkan masyarakat	55% - - 580 Ormas, LSM dan LNL 55%	100% 9 parpol 1 Dokumen ^{k)} 2580 Ormas, LSM dan LNL ^{k)} 100%	Program Pembinaan Kesatuan Bangsa dan Politik	Kemendagri (Ditjen Kesbangpol)	184,5

SUB BIDANG PEMBANGUNAN : POLITIK DALAM NEGERI DAN KOMUNIKASI
 PRIORITAS SUB BIDANG : PELEMBAGAAN DEMOKRASI

NO	FOKUS PRIORITAS /KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010 - 2014 (Rp. Miliar)1)
				2010	2014			
			% kemajuan pengembangan Democracy Trust Fund	-	85%			
			Jumlah laporan fasilitasi pertemuan, forum dan uji publik untuk masukan penyusunan naskah akademis dan draft RPP Insentif Perpajakan.	-	3 laporan (1 ^{k)} laporan masukan hasil pertemuan/forum, 1 laporan masukan hasil uji publik, dan 1 laporan sosialisasi)			
			% kumulatif provinsi/ kabupaten/kota yang mendapatkan sosialisasi dan fasilitasi peningkatan peran FKUB	50%	85%			
			Jumlah dokumen evaluasi UU No 9 Tahun 1961 mengenai Pengumpulan Uang atau Barang	-	2 ^{k)}			
			Jumlah publikasi <i>best practices</i> dan inovasi praktek demokrasi	-	200 ^{k)}			

SUB BIDANG PEMBANGUNAN : POLITIK DALAM NEGERI DAN KOMUNIKASI
 PRIORITAS SUB BIDANG : PELEMBAGAAN DEMOKRASI

NO	FOKUS PRIORITAS /KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010 - 2014 (Rp. Miliar)1)
				2010	2014			
			% kumulatif wilayah Indonesia yang mendapatkan fasilitasi peningkatan peran forum publik	-	65%			
			Tahapan perumusan kebijakan yang mendorong peran dan keberlanjutan organisasi politik dan masyarakat dan mendorong kerja sama organisasi masyarakat dengan pemda	Kajian PP tentang Partai Lokal di Aceh Permendagri tentang Pelaksanaan Koordinasi Pemantauan Orang Asing dan Lembaga Asing Permendagri tentang Fasilitasi Pelayanan dan Pemantauan Tenaga Kerja Orang Asing	PP tentang Partai Lokal di Aceh Permendagri tentang Pelaksanaan Koordinasi Pemantauan Orang Asing dan Lembaga Asing Permendagri tentang Fasilitasi Pelayanan dan Pemantauan Tenaga Kerja Orang Asing			

SUB BIDANG PEMBANGUNAN : POLITIK DALAM NEGERI DAN KOMUNIKASI
 PRIORITAS SUB BIDANG : PELEMBAGAAN DEMOKRASI

NO	FOKUS PRIORITAS /KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010 - 2014 (Rp. Miliar)1)
				2010	2014			
				25% pemda bekerja sama dengan organisasi masyarakat sipil	70% pemda bekerja sama dengan organisasi masyarakat sipil			
				-	PP tentang Bantuan Keuangan Parpol			
				-	Permendagri tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Parpol			
			Tingkat kepuasan pelayanan organisasi kemasyarakatan, termasuk data basenya.	50%	75%			

SUB BIDANG PEMBANGUNAN : POLITIK DALAM NEGERI DAN KOMUNIKASI
 PRIORITAS SUB BIDANG : PELEMBAGAAN DEMOKRASI

NO	FOKUS PRIORITAS /KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010 - 2014 (Rp. Miliar)1)
				2010	2014			
1.2	Penyiapan penyusunan rancangan peraturan KPU, advokasi, penyelesaian sengketa dan penyuluhan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu	Terselenggaranya penyiapan penyusunan rancangan peraturan KPU, advokasi hukum dan penyuluhannya	Tingkat ketepatan penyiapan analisis dan masukan rancangan verifikasi peraturan parpol, perseorangan peserta pemilu dan dana kampanye peserta pemilu, penyusunan dapil, dll	60%	85%	Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik	Komisi Pemilihan Umum (KPU)	111,0
			Tingkat ketepatan penyiapan penyusunan regulasi penyelenggaraan pemilu 2014	-	85%			
			Tingkat ketepatan penyiapan penyusunan tata cara dan pelaksanaan advokasi dan penyelesaian sengketa hukum	60%	90%			
			Tingkat ketepatan penyiapan penyusunan dokumentasi dan informasi hukum, peraturan perundangan, dan pelaksanaan penyuluhan hukum	60%	90%			

SUB BIDANG PEMBANGUNAN : POLITIK DALAM NEGERI DAN KOMUNIKASI
 PRIORITAS SUB BIDANG : PELEMBAGAAN DEMOKRASI

NO	FOKUS PRIORITAS /KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010 - 2014 (Rp. Miliar)1)
				2010	2014			
1.3	Pengelolaan data, dokumentasi, pengadaan, pendistribusian, dan inventarisasi sarana dan pra sarana pemilu	Terselenggaranya pengelolaan data, dokumentasi, pengadaan, pendistribusian, inventarisasi sarana dan pra sarana serta terpenuhinya logistik keperluan pemilu.	Tingkat ketepatan pengelolaan informasi kebutuhan pemilu	-	90%	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Komisi Pemilihan Umum (KPU)	150,0
			Tingkat ketepatan pengadaan dan distribusi logistik pemilu	-	100%			
			Tingkat ketepatan standar mutu barang/jasa administrasi pengadaan dan dokumentasi pengadaan kebutuhan pemilu	-	95%			
			% kemajuan penyusunan peta distribusi logistik pemilu	-	100%			
			Tingkat keberhasilan pemeliharaan sarana dan pra sarana pemilu	60%	77,50%			
1.4	Pelaksanaan manajemen perencanaan dan data	Tersedianya dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta hasil monitoring dan evaluasi	% kesesuaian antara Renstra dan Renja K/L dan RKA K/L	60%	77,50%	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Komisi Pemilihan Umum (KPU)	173,0
			% fasilitasi kerja sama KPU dengan lembaga lain	60%	77,50%			

SUB BIDANG PEMBANGUNAN : POLITIK DALAM NEGERI DAN KOMUNIKASI

PRIORITAS SUB BIDANG : PELEMBAGAAN DEMOKRASI

NO	FOKUS PRIORITAS /KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010 - 2014 (Rp. Miliar)1)
				2010	2014			
			% laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	60%	77,50%			
			% kemajuan penyusunan dan pelaksanaan model dan pedoman reformas birokrasi dan tata kelola KPU	-	100% (tersusunnya model dan pedoman, serta penerapannya)			
			Frekuensi pemutakhiran data pemilih di tingkat kelurahan di seluruh wilayah Indonesia	-	8 kali ^{K)}			

SUB BIDANG PEMBANGUNAN : POLITIK DALAM NEGERI DAN KOMUNIKASI
 PRIORITAS SUB BIDANG : PELEMBAGAAN DEMOKRASI

NO	FOKUS PRIORITAS /KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010 - 2014 (Rp. Miliar)1)
				2010	2014			
II	PENINGKATAN IKLIM KONDUSIF BAGI BERKEMBANGNYA KEBEBASAN SIPIL DAN HAK-HAK POLITIK RAKYAT	Semakin terjaminnya peningkatan iklim politik kondusif bagi berkembangnya kualitas kebebasan sipil dan hak- hak politik rakyat yang semakin seimbang dengan peningkatan kepatuhan terhadap pranata hukum	Indeks Kebebasan Sipil	75,7 *)	80			670,3
			Indeks Hak-Hak Politik	53 *)	70			
			Tingkat partisipasi pemilih (pemilu dan pemilu kepala daerah)	-	75%			
KEGIATAN PRIORITAS								
2.1	Koordinasi pemantapan demokratisasi dan kelembagaan	Terselenggaranya koordinasi kebijakan pemantapan demokratisasi dan kelembagaan	Jumlah Rapat Koordinasi Pemantapan Demokratisasi dan Kelembagaan	12	60 ^{k)}	Program Peningkatan Koordinasi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	KEMENKO POLHUKAM	39,9
			Jumlah dokumen Indeks Demokrasi Indonesia	-	3 ^{k)}			
			Jumlah pemantauan dan evaluasi	4	20 ^{k)}			

SUB BIDANG PEMBANGUNAN : POLITIK DALAM NEGERI DAN KOMUNIKASI
 PRIORITAS SUB BIDANG : PELEMBAGAAN DEMOKRASI

NO	FOKUS PRIORITAS /KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010 - 2014 (Rp. Miliar)1)
				2010	2014			
2.2	Koordinasi pengelolaan pemantapan otonomi khusus	Terselenggaranya koordinasi kebijakan pengelolaan pemantapan otonomi khusus	Jumlah Rapat Koordinasi Otonomi Khusus	12	60 ^{K)}	Program Peningkatan Koordinasi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	KEMENKO POLHUKAM	35,2
			Jumlah pemantauan dan evaluasi	4	20 ^{K)}			
			Jumlah Rapat Koordinasi Desk Papua	12	60 ^{K)}			
			Jumlah pemantauan perkembangan sosial politik di Papua	4	20 ^{K)}			
2.3	Koordinasi penanganan konflik dan kontijensi	Terselenggaranya Koordinasi Kebijakan Penanganan Konflik dan Kontijensi	Jumlah Rapat Koordinasi Penanganan Konflik dan Kontijensi	12	60 ^{K)}	Program Peningkatan Koordinasi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	KEMENKO POLHUKAM	36,1
			Jumlah pemantauan dan evaluasi	4	20 ^{K)}			
			Jumlah Rapat Koordinasi Desk Aceh	12	60 ^{K)}			
			Jumlah pemantauan perkembangan sosial politik di NAD	4	20 ^{K)}			
			Jumlah Rapat Koordinasi Desk Sulteng	12	60 ^{K)}			
			Jumlah pemantauan dan evaluasi perkembangan sosial politik di Sulteng	4	20 ^{K)}			

SUB BIDANG PEMBANGUNAN : POLITIK DALAM NEGERI DAN KOMUNIKASI
 PRIORITAS SUB BIDANG : PELEMBAGAAN DEMOKRASI

NO	FOKUS PRIORITAS /KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010 - 2014 (Rp. Miliar)1)
				2010	2014			
2.4	Koordinasi wawasan kebangsaan	Terselenggaranya koordinasi kebijakan wawasan kebangsaan	Jumlah Rapat Koordinasi Wawasan Kebangsaan	12	60 ^{K)}	Program Peningkatan Koordinasi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	KEMENKO POLHUKAM	3,4
			Jumlah pemantauan dan evaluasi	4	20 ^{K)}			
2.5	Fasilitasi penanganan konflik	Terlaksananya penyusunan kebijakan dan fasilitasi penanganan konflik	% kemajuan penetapan UU Penanganan Konflik	-	100%	Program Pembinaan Kesatuan Bangsa dan Politik	Kemendagri (Ditjen Kesbangpol)	88,1
			% kumulatif provinsi/kabupaten/kota yang mendapatkan fasilitasi pembentukan dan fasilitasi pelembagaan penguatan forum dialog penyelesaian konflik	40%	75%			
			Jumlah angkatan aparaturnya yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan manajemen konflik dan negosiasi	8	48 ^{K)}			
			Jumlah wilayah yang mendapatkan fasilitasi penanganan konflik berkaitan dengan aspek pemerintahan dan keamanan	6 wilayah pasca konflik (NAD, Kalteng, Sulteng, Maluku, Maluku Utara dan Papua Barat)	8 wilayah pasca konflik (NAD, Kalteng, Sulteng, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat, dan NTT)			

SUB BIDANG PEMBANGUNAN : POLITIK DALAM NEGERI DAN KOMUNIKASI
 PRIORITAS SUB BIDANG : PELEMBAGAAN DEMOKRASI

NO	FOKUS PRIORITAS /KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010 - 2014 (Rp. Miliar)1)
				2010	2014			
					<ul style="list-style-type: none"> - 16 wilayah rawan konflik - 10 wilayah potensi konflik 			
			Jumlah dokumen laporan situasi daerah	1 laporan puskomin	5 laporan puskomin ^{k)}			
			Jumlah paket kerja sama dengan organisasi masyarakat sipil dalam penanganan konflik	-	400 paket kerjasama di 33 provinsi ^{k)}			
2.6	Pengembangan nilai-nilai kebangsaan	Terlaksananya penyusunan kebijakan, dukungan dan fasilitasi pengembangan nilai-nilai kebangsaan	% penyelesaian rumusan kebijakan pengembangan nilai kebangsaan Indonesia yang tepat waktu	-	87%	Program Pembinaan Kesatuan Bangsa dan Politik	Kemendagri (Ditjen Kesbangpol)	50,4
			Jumlah Modul Pengembangan Nilai Kebangsaan	-	4 Modul (3 Modul ^{k)} Wawasan Kebangsaan, dan 1 Modul Bingkai Kebangsaan)			

SUB BIDANG PEMBANGUNAN : POLITIK DALAM NEGERI DAN KOMUNIKASI
 PRIORITAS SUB BIDANG : PELEMBAGAAN DEMOKRASI

NO	FOKUS PRIORITAS /KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010 - 2014 (Rp. Miliar)1)
				2010	2014			
				-	3 Modul (1 Modul pembauran kebangsaan, 1 modul Pancasila sebagai Dasar Negara dan Ideologi Bangsa, 1 Modul Ketahanan Bangsa)			
				-	3 Modul Bela Negara ^{k)}			
				-	2 Modul (1 Modul ^{k)} Pengembangan Nilai-Nilai Pranata Sosial dan 1 Modul Pengembangan Nilai-Nilai Budaya)			

SUB BIDANG PEMBANGUNAN : POLITIK DALAM NEGERI DAN KOMUNIKASI
 PRIORITAS SUB BIDANG : PELEMBAGAAN DEMOKRASI

NO	FOKUS PRIORITAS /KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010 - 2014 (Rp. Miliar)1)
				2010	2014			
			Jumlah forum sosialisasi pengembangan nilai kebangsaan untuk pemuda, perempuan, aparatur pemerintah	-	85 ^{k)}			
			Jumlah peserta TOT/peningkatan kapasitas kader pembauran di daerah	-	196 orang dari 28 ^{k)} provinsi			
2.7	Pembinaan dan pengembangan budaya politik	Terlaksananya penyusunan kebijakan, dukungan dan fasilitasi pengembangan budaya politik yang berdasarkan pada 4 pilar negara (Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI)	% penyusunan rumusan kebijakan pembinaan dan pengembangan budaya politik yang akuntabel dan tepat waktu	-	90%	Program Pembinaan Kesatuan Bangsa dan Politik	Kemendagri (Ditjen Kesbangpol)	98,1
			% penyusunan rumusan kebijakan pendidikan perdamaian yang akuntabel dan tepat waktu	-	82,50%			
			Jumlah paket kerja sama pembinaan dan pengembangan budaya politik di wilayah miskin, terisolasi, perbatasan dan kaum marginal	-	536 ^{k)}			

SUB BIDANG PEMBANGUNAN : POLITIK DALAM NEGERI DAN KOMUNIKASI
 PRIORITAS SUB BIDANG : PELEMBAGAAN DEMOKRASI

NO	FOKUS PRIORITAS /KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010 - 2014 (Rp. Miliar)1)
				2010	2014			
			Jumlah paket kerja sama sosialisasi perundang-undangan dan cinta tanah air	-	536 paket ^{K)} kerjasama di 33 provinsi			
			Jumlah provinsi yang mendapatkan fasilitasi pengembangan kelompok kerja demokrasi dan pendampingan pusat pendidikan kewarganegaraan	33	33			
			Jumlah akumulasi provinsi yang membangun dan memperkuat pusat pendidikan kewarganegaraan/politik rakyat	-	25			
			Jumlah materi/modul pendidikan politik bagi calon pemilih pemula	3 modul tentang pendidikan politik bagi calon pemilih pemula	15 modul tentang pendidikan politik bagi calon pemilih pemula ^{K)}			

SUB BIDANG PEMBANGUNAN : POLITIK DALAM NEGERI DAN KOMUNIKASI
 PRIORITAS SUB BIDANG : PELEMBAGAAN DEMOKRASI

NO	FOKUS PRIORITAS /KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010 - 2014 (Rp. Miliar)1)
				2010	2014			
2.8	Lembaga perwakilan dan partisipasi politik	Terlaksananya penyusunan kebijakan, dukungan dan fasilitasi lembaga perwakilan dan partisipasi politik	% penyusunan rumusan kebijakan fasilitasi lembaga perwakilan dan pengembangan partisipasi politik yang akuntabel dan tepat waktu	50%	90%	Program Pembinaan Kesatuan Bangsa dan Politik	Kemendagri (Ditjen Kesbangpol)	68,5
			% penyusunan mekanisme partisipasi politik rakyat dalam keterlibatan penyusunan kebijakan publik dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan tepat waktu	50%	90%			
			% pelaksanaan fasilitasi hubungan kerja antar pemerintah dengan lembaga perwakilan	50%	90%			
			Jumlah forum komunikasi politik	-	12 ^{ki)}			
			% laporan pemantauan dan pelaporan perkembangan politik yang tepat waktu	75%	95%			
			Jumlah dokumen evaluasi sistem dan pelaksanaan pemilihan umum	1	5 ^{ki)}			
			% kemajuan penetapan rancangan revisi UU No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum	100%	100%			

SUB BIDANG PEMBANGUNAN : POLITIK DALAM NEGERI DAN KOMUNIKASI
 PRIORITAS SUB BIDANG : PELEMBAGAAN DEMOKRASI

NO	FOKUS PRIORITAS /KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010 - 2014 (Rp. Miliar)1)
				2010	2014			
			% kemajuan penyusunan rancangan revisi terbatas UU No. 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD	50%	100%			
			% kemajuan penyusunan rancangan revisi terbatas UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD	50%	100%			
			% kemajuan penyusunan rancangan revisi terbatas UU No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden	50%	100%			
			Jumlah paket kerja sama dengan organisasi masyarakat sipil dalam peningkatan partisipasi politik perempuan	-	400 ^{k)}			
2.9	Penyempurnaan pelaksanaan pemilihan kepala daerah	Tersusunnya UU tentang PEMILU Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan terselenggaranya Pilkada yang efisien.	% revisi terbatas UU 32 tahun 2004 terkait dengan efisiensi pelaksanaan pilkada	100%	100%	Program Pengelolaan Desentralisasi dan Otonomi Daerah	Kemendagri	3,0
			Jumlah UU tentang PEMILU Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1UU	1 UU ^{k)}			

SUB BIDANG PEMBANGUNAN : POLITIK DALAM NEGERI DAN KOMUNIKASI
 PRIORITAS SUB BIDANG : PELEMBAGAAN DEMOKRASI

NO	FOKUS PRIORITAS /KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010 - 2014 (Rp. Miliar)1)
				2010	2014			
2.10	Pedoman, petunjuk teknis dan bimbingan teknis/supervisi/publikasi/sosialisasi penyelenggaraan pemilu dan pendidikan pemilih	Terselenggaranya bimbingan teknis/supervisi/publikasi/sosialisasi penyelenggaraan pemilu dan pendidikan pemilih	% pedoman dan petunjuk teknis bimbingan teknis penyelenggaraan pemilu yang diselesaikan tepat waktu dan akuntabel	60%	77,50%		Komisi Pemilihan Umum (KPU)	247,5
			% pedoman dan petunjuk teknis dalam rangka PAW anggota DPR, DPD, DPRD dan KPU yang diselesaikan dengan akuntabel dan tepat waktu	60%	77,50%			
			% fasilitasi bimbingan teknis (bimtek) pemilu kepala daerah untuk KPU prov/kab/kota, PPK, dan PPS yang tepat waktu, sesuai rencana dan efektif	75%	85%			
			% fasilitasi bimbingan teknis (bimtek) pemilu legislatif dan presiden untuk KPU prov/kab/kota, PPK dan PPS yang tepat waktu sesuai rencana dan efektif	-	85%			
			% kemajuan pengembangan pusat pendidikan pemilih	35%	100%			
			Jumlah modul pendidikan pemilih untuk kelompok perempuan, miskin, cacat, pemilih pemula, lansia	5	25 ^{ki)}			

SUB BIDANG PEMBANGUNAN : POLITIK DALAM NEGERI DAN KOMUNIKASI
 PRIORITAS SUB BIDANG : PELEMBAGAAN DEMOKRASI

NO	FOKUS PRIORITAS /KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010 - 2014 (Rp. Miliar)1)
				2010	2014			
			Jumlah kerja sama dan kegiatan pendidikan pemilih yang dilaksanakan	-	40 media massa ^{K)}			
					kerja sama dengan 1000 OMS ^{K)}			
					40 kegiatan kemasyarakatan ^{K)}			
			% kemajuan pengembangan media center	60%	80%			
			Jumlah kegiatan pendidikan pemilih bagi caleg perempuan	-	40 ^{K)}			
			Jumlah kader parpol perempuan yang mendapatkan pendidikan politik	-	500 ^{K)}			

SUB BIDANG PEMBANGUNAN : POLITIK DALAM NEGERI DAN KOMUNIKASI
 PRIORITAS SUB BIDANG : PELEMBAGAAN DEMOKRASI

NO	FOKUS PRIORITAS /KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010 - 2014 (Rp. Miliar)1)
				2010	2014			
III	PENINGKATAN PERAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI	Meningkatnya layanan dan akses terhadap informasi publik	% masyarakat pengguna sarana/prasarana komunikasi	50%	80%			956,9
	KEGIATAN PRIORITAS							
3.1	Penyediaan dan pengelolaan informasi	Tersedianya konten informasi publik yang beragam dan berkualitas yang bersifat mendidik, mencerahkan, dan memberdayakan masyarakat dalam rangka NKRI	Dokumen <i>Grand design</i> pengelolaan konten dan strategi penyebaran informasi Dokumen <i>database</i> nasional, sektoral dan regional mengenai informasi publik % paket konten informasi publik yang siap pakai dan dimanfaatkan oleh penda Jumlah aktivitas untuk peningkatan <i>citizen journalism</i>	- 3 paket 60%	1 15 paket ^{K)} 80%	Program Pengembangan Informasi dan Komunikasi Publik	Kementerian Komunikasi dan Informatika	62,7
3.2	Penyebaran/diseminasi informasi publik	Terlaksananya penyebaran/diseminasi informasi publik	Jumlah dokumen <i>Grand Design Media Centre</i> Jumlah <i>media center</i> yang diperkuat di provinsi/kabupaten/kota Jumlah <i>media center</i> lengkap dan berfungsi sesuai standar di provinsi/kabupaten/kota di daerah terluar/terdepan/pasca konflik % jumlah kerja sama dengan lembaga multilateral, bilateral dan regional yang efektif % aktivitas penyebaran informasi publik langsung ke masyarakat sesuai rencana	1 75 bimtek - 65%	1 75 Bimtek dan 60 penguatan <i>media center</i> ^{K)} 60 <i>media center</i> ^{K)} 85%	Program Pengembangan Informasi dan Komunikasi Publik	Kementerian Komunikasi dan Informatika	87,1

SUB BIDANG PEMBANGUNAN : POLITIK DALAM NEGERI DAN KOMUNIKASI
 PRIORITAS SUB BIDANG : PELEMBAGAAN DEMOKRASI

NO	FOKUS PRIORITAS /KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010 - 2014 (Rp. Miliar)1)
				2010	2014			
3.3	Pengembangan kebijakan komunikasi nasional	Terselenggaranya pengembangan kebijakan komunikasi nasional	% kebijakan, regulasi dan standarisasi di bidang komunikasi dan informasi publik untuk mendukung masyarakat informasi	70%	90%	Program Pengembangan Informasi dan Komunikasi Publik	Kementerian Komunikasi dan Informatika	20,9
			% laporan pemantauan dan analisis pelaksanaan kebijakan dan regulasi bidang komunikasi dan informasi yang tepat waktu dan dimanfaatkan oleh pimpinan	65%	85%			
3.4	Peningkatan peran media publik dalam pengembangan komunikasi dan informasi Nasional	Terlaksananya peningkatan peran media publik	Jumlah aktivitas penguatan lembaga/media publik	5 paket	25 paket ^{K)}	Program Pengembangan Informasi dan Komunikasi Publik	Kementerian Komunikasi dan Informatika	69,7
			Jumlah koordinasi dengan lembaga penyiaran publik TVRI, RRI dan LKBN Antara	12 kali	60 kali ^{K)}			
3.5	Pengembangan kemitraan lembaga komunikasi	Terselenggaranya pengembangan kemitraan lembaga komunikasi	% aktivitas peningkatan peran organisasi kemasyarakatan sebagai penyebar informasi (KIM, media tradisional, media komunitas) di wilayah perbatasan dan daerah tertinggal yang dilaksanakan tepat waktu	60%	80%	Program Pengembangan Informasi dan Komunikasi Publik	Kementerian Komunikasi dan Informatika	297,5
			% aktivitas yang efektif untuk mendorong media literasi	60%	80%			
			% fasilitasi penyebaran informasi publik melalui media kemasyarakatan yang tepat waktu dan akuntabel	70%	90%			

SUB BIDANG PEMBANGUNAN : POLITIK DALAM NEGERI DAN KOMUNIKASI
 PRIORITAS SUB BIDANG : PELEMBAGAAN DEMOKRASI

NO	FOKUS PRIORITAS /KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010 - 2014 (Rp. Miliar)1)
				2010	2014			
3.6	Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya Komisi Informasi (KI) Pusat	Tersedianya dukungan teknis dan manajemen dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Komisi Informasi (KI) Pusat	% pengaduan perselisihan masalah informasi publik yang terselesaikan	70%	90%			34,5
			% lembaga publik yang melaksanakan kode etik keterbukaan informasi publik	70%	90%			
			Jumlah kegiatan pelaksanaan program pengembangan peran Komisi Informasi Pusat	12 paket	60 paket ^{K)}			
3.7	Penelitian dan pengembangan aplikasi informatika dan informasi publik	Terlaksananya penelitian dan pengembangan aplikasi informatika dan informasi publik	Jumlah karya riset Bidang Aplikasi Informatika dan Informasi Publik	10 paket	50 paket ^{K)}	Program Penelitian dan Pengembangan Bidang Komunikasi dan Pengembangan SDM	Kementerian Komunikasi dan Informatika	50,5
			% pemanfaatan karya riset bidang aplikasi informatika dan informasi publik untuk penyusunan kebijakan/regulasi di bidang kominfo	15%	35%			
3.8	Penelitian dan pengembangan literasi dan profesi	Terlaksananya penelitian dan pengembangan literasi dan profesi	Jumlah karya riset Bidang Literasi dan Profesi	10	50 ^{K)}	Program Penelitian dan Pengembangan Bidang Komunikasi dan Pengembangan SDM	Kementerian Komunikasi dan Informatika	331,8
			% pemanfaatan karya riset bidang literasi dan profesi untuk penyusunan kebijakan/regulasi di bidang kominfo	15%	35%			
			Jumlah peserta Bimtek CIO	524	2524 ^{K)}			
			Jumlah peserta Bimtek Budaya dokumentasi	1048	3048 ^{K)}			
			Jumlah peserta pelatihan komunikasi publik	1025	3025 ^{K)}			

SUB BIDANG PEMBANGUNAN : POLITIK DALAM NEGERI DAN KOMUNIKASI
 PRIORITAS SUB BIDANG : PELEMBAGAAN DEMOKRASI

NO	FOKUS PRIORITAS /KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010 - 2014 (Rp. Miliar) ¹⁾
				2010	2014			
			Jumlah penerima beasiswa S2/S3 dalam dan luar negeri	198	1398 ^{k)}			
			Jumlah paket standar kompetensi kerja bidang kominfo	2	42 ^{k)}			
			Jumlah SDM Kominfo yang bersertifikasi	80	4980 ^{k)}			
3.9	Koordinasi <i>Media Center</i> dan kehumasan	Terselenggaranya Koordinasi Kebijakan <i>Media Center</i> dan Kehumasan	Jumlah Rapat Koordinasi penguatan <i>Media Center</i> dan Kehumasan	12	60 ^{k)}	Program Peningkatan Koordinasi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	KEMENKO POLHUKAM	3,4
			Jumlah Rapat Koordinasi KIP	12	60 ^{k)}			
			Jumlah pemantauan dan evaluasi	4	20 ^{k)}			
T O T A L								2.245,7

Keterangan:

^{a)} Indeks Demokrasi Indonesia Tahun 2007

^{k)} Aneka kumulatif 5 tahun (2010-2014)

¹⁾ Total alokasi untuk Kemenkominfo adalah periode 2011-2014 karena adanya pengelompokan ulang direktorat dan direktorat jenderal sehingga kegiatan-kegiatan di tahun 2010 tidak dapat dipetakan satu-satu dengan kegiatan-kegiatan di 2011-2014

**RENCANA TINDAK PRIORITAS BIDANG
POLITIK LUAR NEGERI**

SUB BIDANG PEMBANGUNAN : POLITIK LUAR NEGERI

PRIORITAS SUB BIDANG : PEMANTAPAN DIPLOMASI DAN KERJASAMA INTERNASIONAL

NO	FOKUS PRIORITAS / KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010 - 2014 (Rp. Miliar)
				2010	2014			
1	Peningkatan Peran dan Kepemimpinan Indonesia Dalam ASEAN Khususnya Dalam Implementasi Piagam ASEAN dan Pembentukan Komunitas ASEAN 2015	Meningkatnya peran dan kepemimpinan Indonesia dalam pembentukan Komunitas ASEAN di bidang politik dan keamanan, ekonomi, dan sosial budaya.	1. % prakarsa/rekomendasi Indonesia yang diadopsi 2. % dukungan dan partisipasi masyarakat domestik terhadap pembentukan komunitas ASEAN 2015	80%	80%			105,1
1.1	Kerjasama ASEAN bidang Politik dan Keamanan	Terlaksananya peran Indonesia dalam mewujudkan komunitas ASEAN di bidang Politik dan Keamanan	1. Jumlah pertemuan/kegiatan/seminar/sidang yang diikuti oleh Indonesia 2. Terlaksananya grand design nasional pelaksanaan Cetak Biru Politik-Keamanan ASEAN 3. Jumlah provinsi/wilayah daerah yang telah memperoleh sosialisasi tentang Cetak Biru ASEAN bidang Politik dan Keamanan	68	350 ^{KI} 80% terlaksana	Program Peningkatan Hubungan dan Politik Luar Negeri melalui Kerjasama ASEAN	Kemenlu	43,9

SUB BIDANG PEMBANGUNAN : POLITIK LUAR NEGERI
PRIORITAS SUB BIDANG : PEMANTAPAN DIPLOMASI DAN KERJASAMA INTERNASIONAL

NO	FOKUS PRIORITAS / KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010 - 2014 (Rp. Miliar)
				2010	2014			
			4. Jumlah pelaksanaan kegiatan terkait dengan dukungan RI kepada Timor Leste dalam upaya menjadi anggota ASEAN.	10	38 ^{KI}			
			5. Jumlah kegiatan terkait pelaksanaan Pertemuan Resmi ASEAN dan Persiapan Indonesia menjadi Ketua ASEAN pada 2013.	2	11 ^{KI}			
1.2	Kerjasama ASEAN bidang Ekonomi	Terlaksananya peran Indonesia dalam mewujudkan komunitas ASEAN di bidang ekonomi dengan karakteristik utama pasar tunggal dan basis produksi, kawasan ekonomi berdaya saing tinggi, kawasan dengan pembangunan ekonomi yang merata dan kawasan yang terintegrasi penuh dengan ekonomi global	1. % partisipasi Indonesia dalam pertemuan/kegiatan/seminar/sidang 2. % partisipasi dalam upaya menjaga sentralitas ASEAN dalam hubungan ekonomi dengan mitra wicara (sidang dengan mitra wicara)	100 % keikutsertaan dalam sidang, dan 76 kertas posisi	100 % keikutsertaan dalam sidang, dan 407 kertas posisi ^{KI}	Program Peningkatan Hubungan dan Politik Luar Negeri melalui Kerjasama ASEAN	Kemenlu	21,7
			3. Jumlah kegiatan dalam rangka meningkatkan pemahaman publik mengenai integrasi ekonomi ASEAN	8 kegiatan, di Pulau Jawa	40 kegiatan di ^{KI} Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua			

SUB BIDANG PEMBANGUNAN : POLITIK LUAR NEGERI
PRIORITAS SUB BIDANG : PEMANTAPAN DIPLOMASI DAN KERJASAMA INTERNASIONAL

NO	FOKUS PRIORITAS / KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010 - 2014 (Rp. Miliar)
				2010	2014			
1.3	Kerjasama ASEAN bidang Fungsional	Terlaksananya peran Indonesia dalam mewujudkan komunitas ASEAN di bidang Sosial Budaya	<p>1. Jumlah pertemuan/kegiatan/seminar/sidang yang diikuti oleh Indonesia</p> <p>2. Jumlah pertemuan koordinasi kerjasama Fungsional/Sosial-Budaya ASEAN dalam rangka ASEAN Senior Official Committee mengenai ASCC di luar negeri</p> <p>3. Jumlah rapat koordinasi teknis dengan instansi teknis terkait dalam rangka persiapan sidang terkait kebijakan politik luar negeri</p> <p>4. Jumlah kegiatan sosialisasi perkembangan isu-isu di bidang Sosial-Budaya dalam kerangka ASEAN kepada masyarakat</p> <p>5. % provinsi yang telah memperoleh sosialisasi mengenai Cetak Biru Sosial-Budaya ASEAN kepada masyarakat dan guru SMP/SMA</p>	<p>38</p> <p>2</p> <p>4</p> <p>5 kali kegiatan sosialisasi dan 1 kali event internasional</p> <p>20% (7 propinsi dari 33 propinsi)</p>	<p>195^{ki}</p> <p>11^{ki}</p> <p>22^{ki}</p> <p>22 kali kegiatan sosialisasi dan 7 kali event internasional</p> <p>100% (33 provinsi)^{ki}</p>	Program Peningkatan Hubungan dan Politik Luar Negeri melalui Kerjasama ASEAN	Kemenlu	22,0

SUB BIDANG PEMBANGUNAN : POLITIK LUAR NEGERI
PRIORITAS SUB BIDANG : PEMANTAPAN DIPLOMASI DAN KERJASAMA INTERNASIONAL

NO	FOKUS PRIORITAS / KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010 - 2014 (Rp. Miliar)
				2010	2014			
1.4	Kerjasama ASEAN dengan Mitra Wicara dan Antar Kawasan	Terlaksananya peran Indonesia dalam mewujudkan Kawasan ASEAN yang Dinamis dan Outward-Looking (kerjasama ASEAN-Australia, China, Canada, Uni Eropa, India, Jepang, Selandia Baru, Republik Korea, Rusia, Amerika Serikat, ASEAN+3, negara-negara East Asia Summit, PBB, Gulf Cooperation Council, MERCOSUR, dan Pakistan)	1. Jumlah pertemuan/sidang dalam rangka implementasi kesepakatan kerjasama di bidang politik, ekonomi, sosial budaya	60	300 ^{KI}	Program Peningkatan Hubungan dan Politik Luar Negeri melalui Kerjasama ASEAN	Kemenlu	14,6
			2. Jumlah kegiatan dalam rangka meningkatkan pemahaman publik mengenai hubungan ASEAN dengan Mitra Wicara serta perkembangan dan tindak lanjut implementasi <i>Plan of Action</i> kerjasama ASEAN dengan Mitra Wicara	4	22 ^{KI}			
1.5	Kegiatan Koordinasi Kerjasama ASEAN	Terselenggaranya Koordinasi Kebijakan Kerjasama ASEAN	1. Jumlah rapat koordinasi pelaksanaan cetak biru Komunitas ASEAN dan kerjasama ASEAN	12	60 ^{KI}	Peningkatan Koordinasi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	Kemenko Polhukam	2,8
			2. Jumlah pemantauan dan evaluasi	4	20 ^{KI}			
2	Peningkatan Peran Indonesia Dalam Menjaga Keamanan Nasional dan Menciptakan Perdamaian Dunia (*)	Meningkatnya peran Indonesia untuk turut menjaga keamanan nasional dan perdamaian dunia melalui pendekatan multilateralisme	Tingkat keberhasilan rekomendasi/ gagasan Pemri yang diterima dalam sidang kerjasama terkait penanganan isu-isu multilateral dan kemajuan kerjasama multilateral	70%	70%			26,3

SUB BIDANG PEMBANGUNAN : POLITIK LUAR NEGERI

PRIORITAS SUB BIDANG : PEMANTAPAN DIPLOMASI DAN KERJASAMA INTERNASIONAL

NO	FOKUS PRIORITAS / KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010 - 2014 (Rp. Miliar)
				2010	2014			
2.1	Kerjasama Multilateral terkait Isu Keamanan Internasional, Senjata Pemusnah Massal dan Senjata Konvensional, Penanggulangan Kejahatan Lintas Negara dan Terorisme	Terlaksananya partisipasi Indonesia dalam forum kerja sama multilateral	1. Jumlah prakarsa Indonesia untuk mendorong reformasi Dewan Keamanan PBB. 2. Jumlah posisi pemri yang disampaikan dalam sidang internasional 3. Jumlah koordinasi teknis 4. Jumlah partisipasi Indonesia pada sidang internasional 5. Jumlah penyelenggaraan pertemuan internasional (Indonesia sebagai tuan rumah)	4 10 19 7 -	20 ^{K1} 50 ^{K1} 119 ^{K1} 35 ^{K1} 3 ^{K1}	Program Peningkatan Peran dan Diplomasi Indonesia di Bidang Multilateral	Kemenlu	20,6
2.2	Kegiatan Koordinasi Strategi Politik Luar Negeri	Terselenggaranya Koordinasi Kebijakan Strategi Politik Luar Negeri	1. Jumlah Rapat Koordinasi peningkatan kualitas Strategi Politik Luar Negeri 2. Jumlah pemantauan dan evaluasi	12 4	60 ^{K1} 20 ^{K1}	Peningkatan Koordinasi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan	Kemenko Polhukam	2,8
2.3	Kegiatan Koordinasi Hubungan Multilateral	Terselenggaranya koordinasi Kebijakan Hubungan Multilateral	1. Jumlah Rapat Koordinasi peningkatan kualitas hubungan multilateral 2. Jumlah pemantauan dan evaluasi	12 4	60 ^{K1} 20 ^{K1}	Peningkatan Koordinasi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan	Kemenko Polhukam	2,8
3	Pelaksanaan Diplomasi Perbatasan yang Terkoordinasi untuk Menjaga Keutuhan Wilayah Darat, Laut, dan Udara Indonesia serta Menjaga Kekayaan Sumber Daya Alam Nasional	Meningkatnya kinerja diplomasi perbatasan	% persoalan yang diselesaikan dalam setiap perundingan perbatasan	20%	100%			84,8

SUB BIDANG PEMBANGUNAN : POLITIK LUAR NEGERI
PRIORITAS SUB BIDANG : PEMANTAPAN DIPLOMASI DAN KERJASAMA INTERNASIONAL

NO	FOKUS PRIORITAS / KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010 - 2014 (Rp. Miliar)
				2010	2014			
3.1	Optimalisasi Diplomasi terkait dengan Perjanjian Politik, Keamanan Kewilayahan dan Kelautan	Terseleenggaranya penguatan diplomasi melalui optimalisasi perjanjian politik, keamanan, kewilayahan dan kelautan	1. Jumlah telaahan dalam proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan politik luar negeri 2. Jumlah telaahan terhadap persoalan-persoalan hukum internasional 3. Jumlah pelaksanaan ratifikasi, penerapan hukum, penyelesaian sengketa hukum, dan perjanjian internasional 4. Jumlah standar, norma, pedoman, kriteria, prosedur, dan pemberian bimbingan teknis, serta evaluasi pembuatan perjanjian internasional 5. Jumlah pelaksanaan perundingan yang terkait dengan pembuatan perjanjian bilateral, regional, dan multilateral antara RI-Malaysia, Filipina, Singapura, Timor Leste, Vietnam, dan Palau 6. Tersusunnya dokumen tentang Ocean Policy	14 13 6 49 12	70 ^{KI} 65 ^{KI} 30 ^{KI} 245 ^{KI} 60 ^{KI}	Program Optimalisasi Diplomasi Terkait dengan Pengelolaan Hukum dan Perjanjian Internasional	Kemenlu	64,2

SUB BIDANG PEMBANGUNAN : POLITIK LUAR NEGERI
PRIORITAS SUB BIDANG : PEMANTAPAN DIPLOMASI DAN KERJASAMA INTERNASIONAL

NO	FOKUS PRIORITAS / KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010 - 2014 (Rp. Miliar)
				2010	2014			
3.2	Kegiatan Koordinasi Wilayah Negara dan Tata Ruang Pertahanan	Terseleenggaranya Koordinasi Kebijakan Wilayah Negara dan Tata Ruang Pertahanan	1. Jumlah Rapat Koordinasi Wilayah Negara dan Tata Ruang Pertahanan 2. Jumlah rapat koordinasi pembentukan Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan 3. Jumlah koordinasi pemetaan batas wilayah RI dengan Malaysia, PNG, Timor Leste, Singapura dan Palau 4. Jumlah pemantauan dan evaluasi 5. Jumlah rapat koordinasi Desk Wiltas dan PPKT 6. Jumlah pemantauan perkembangan sosial politik di Wiltas dan PPKT	12	60 ^{KI}	Peningkatan Koordinasi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan	Kemenko Polhukam	20,6
4	Peningkatan Pelayanan dan Perlindungan WNI/BHI di Luar Negeri	Terlindunginya kepentingan nasional dan meningkatnya upaya perlindungan WNI/BHI di luar negeri	Tingkat pelayanan perlindungan WNI/BHI yang memadai dan tepat waktu	100%	100%			1.120,3

SUB BIDANG PEMBANGUNAN : POLITIK LUAR NEGERI

PRIORITAS SUB BIDANG : PEMANTAPAN DIPLOMASI DAN KERJASAMA INTERNASIONAL

NO	FOKUS PRIORITAS / KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010 - 2014 (Rp. Miliar)
				2010	2014			
4.1	Peningkatan Perlindungan dan Pelayanan WNI/BHI di Luar Negeri	Terlaksananya pelayanan dan perlindungan WNI/BHI	1. Jumlah pertemuan dengan negara sahabat terkait perlindungan WNI/BHI dengan negara lain 2. Jumlah Citizen Services yang diperkuat 3. Jumlah WNI/TKI yang memperoleh fasilitas di penampungan 4. Jumlah WNI/TKI yang direpatriasi 5. Jumlah WNI/TKI yang dideportasi 6. % pemberian bantuan hukum (advokasi dan lawyer) bagi WNI terutama tenaga kerja wanita 7. Jumlah laporan monitoring dan evaluasi pelayanan dan perlindungan WNI/TKI 8. Jumlah sosialisasi untuk PJTKI tentang pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri 9. Jumlah koordinasi dengan instansi terkait baik di dalam maupun di luar negeri 10. Tersedianya <i>database</i> mengenai penyebaran WNI terdaftar di seluruh perwakilan di luar negeri	5 24 - - - - - 3 65 Database WNI/BHI di seluruh perwakilan	35 ^{KI} 120 ^{KI} 14998 14998 ^{KI} 24020 ^{KI} 100% 96 ^{KI} 15 ^{KI} 390 ^{KI} Database WNI/BHI di seluruh perwakilan	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Keprotokolan dan Kekonsuleran	Kemenlu	1.120,3

SUB BIDANG PEMBANGUNAN : POLITIK LUAR NEGERI

PRIORITAS SUB BIDANG : PEMANTAPAN DIPLOMASI DAN KERJASAMA INTERNASIONAL

NO	FOKUS PRIORITAS / KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010 - 2014 (Rp. Miliar)
				2010	2014			
			11. Jumlah buku saku/leaflet tentang informasi pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri	1	9 ^{KI}			
			12. Jumlah kota yang menjadi program diseminasi perlindungan WNI melalui media elektronik	15	125 ^{KI}			
			13. Jumlah tayangan iklan tentang pelayanan dan perlindungan WNI/BHI di luar negeri	6	76 ^{KI}			
5	Peningkatan Peran Indonesia Dalam Pemajuan Demokrasi, HAM, Lingkungan Hidup, dan Perlindungan Budaya (**)	Meningkatnya citra Indonesia di dunia internasional dalam pemajuan demokrasi, HAM, lingkungan hidup, dan perlindungan budaya	1. Tingkat persepsi positif masyarakat internasional terhadap Indonesia 2. Tingkat keberhasilan rekomendasi/gagasan Pemri yang diterima dalam sidang terkait penanganan isu-isu HAM, lingkungan hidup, dan perlindungan budaya	Baik	Baik			182,2
5.1	Penguatan Citra Indonesia Melalui Diplomasi Publik	Terselenggaranya kegiatan pemberian dukungan publik di dalam dan luar negeri bagi pelaksanaan politik luar negeri RI	1. Jumlah koordinasi dalam rangka meningkatkan kualitas diplomasi publik 2. Tingkat penyelesaian legal matters Museum KAA 3. Jumlah pelaksanaan kegiatan dalam rangka diplomasi publik, baik di dalam negeri maupun di luar negeri khususnya terkait isu demokrasi, interfaith dialogue, global media dialogue, dan cultural exchange	3 kali Updates from the Regions 50 % Penyelesaian Legal Matters MKAA Bandung 21	22 kali Updates from the Regions ^{KI} 100 % Penyelesaian Legal Matters MKAA Bandung 120 ^{KI}	Optimalisasi Informasi dan Diplomasi Publik	Kemenlu	115,9

SUB BIDANG PEMBANGUNAN : POLITIK LUAR NEGERI

PRIORITAS SUB BIDANG : PEMANTAPAN DIPLOMASI DAN KERJASAMA INTERNASIONAL

NO	FOKUS PRIORITAS / KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010 - 2014 (Rp. Miliar)
				2010	2014			
			4. Jumlah penyelenggaraan pertemuan internasional di bidang diplomasi publik	1 kali penyelenggaraan BDF (3 rangkaian kegiatan Bali Democracy Forum : workshop, BDF EGPM, BDF , operasionalisasi Sekretariat IDP, Publikasi)	5 kali penyelenggaraan BDF(48 rangkaian kegiatan Bali Democracy Forum : workshop, BDF EGPM, BDF, operasionalisasi Sekretariat IDP, Publikasi)			
			5. Jumlah diseminasi informasi mengenai kebijakan luar negeri dan pelaksanaan tugas Kemenlu dan Perwakilan RI di luar negeri kepada publik dalam dan luar negeri.	20	117			
			6. Jumlah Promosi dan Community Outreach Museum KAA	8	40			
			7. Revitalisasi Museum KAA (tergantung dari penyelesaian legal matters MKAA)	100 % Revitalisasi Museum KAA	100 % Revitalisasi Museum KAA			
5.2	Kerjasama Multilateral Dalam Rangka Pemajuan dan Perlindungan HAM serta Penanganan Isu Kemanusiaan	Terlaksananya partisipasi Indonesia dalam forum kerja sama multilateral tentang pemajuan dan perlindungan HAM serta penanganan isu kemanusiaan termasuk penanganan isu residual Timor-Timur, dan penanganan isu kemanusiaan pada tingkat nasional	1. Jumlah koordinasi teknis	28	196	Peningkatan Peran dan Diplomasi Indonesia di bidang Multilateral	Kemenlu	40,0
		2. Jumlah penyelenggaraan pertemuan/kerjasama internasional	12	60				
		3. Jumlah partisipasi Indonesia pada sidang internasional	4	226				
		4. Jumlah posisi Pemri yang disampaikan dalam sidang internasional	5	227				
5.3	Kerjasama Multilateral Terkait Isu Pembangunan Ekonomi, Keuangan, dan Lingkungan Hidup	Terlaksananya partisipasi Indonesia dalam setiap forum kerja sama multilateral tentang pembangunan ekonomi, keuangan,	1. Jumlah Posisi pemri yang disampaikan dalam sidang internasional	8	40	Peningkatan Peran dan Diplomasi Indonesia di Bidang Multilateral	Kemenlu	26,3
			2. Jumlah koordinasi teknis	52	260			

SUB BIDANG PEMBANGUNAN : POLITIK LUAR NEGERI
PRIORITAS SUB BIDANG : PEMANTAPAN DIPLOMASI DAN KERJASAMA INTERNASIONAL

NO	FOKUS PRIORITAS / KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010 - 2014 (Rp. Miliar)
				2010	2014			
			3. Jumlah penyelenggaraan pertemuan/kerjasama internasional	2	6 ^{K1}			
			4. Jumlah partisipasi Indonesia dalam sidang regional dan multilateral	27	135 ^{K1}			
6	Pemantapan Kemitraan Strategis di Kawasan Asia Pasifik dan Afrika, serta Kawasan Amerika dan Eropa	Terwujudnya perluasan akses dan meningkatnya kerjasama bilateral dan regional di bidang ekonomi, perdagangan, investasi, budaya dan pariwisata, serta pembangunan di kawasan Asia Pasifik dan Afrika serta kawasan Amerika dan Eropa	1. % prakarsa/rekomendasi Indonesia yang diadopsi	70%	70%			202,4
			2. Tingkat kelancaran hubungan dan kerjasama bilateral di berbagai bidang.	80%	80%			
6.1	Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri di Kawasan Asia Timur dan Pasifik	Terlaksananya peran Indonesia dalam kerjasama di bidang politik, keamanan, ekonomi, dan sosial budaya dengan negara-negara di kawasan Asia Timur dan Pasifik	1. % fasilitasi penyelenggaraan kerjasama	100%	100%	Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri serta Optimalisasi Diplomasi di Kawasan Asia Pasifik dan Afrika	Kemenu	27,8
			2. Jumlah dokumen implementasi kesepakatan	15	82 ^{K1}			
			3. Jumlah kunjungan/pernyataan dukungan Kepala Negara/Pemerintahan dan Pejabat Tinggi dari/ke negara-negara di kawasan Asia Timur dan Pasifik	4	51 ^{K1}			
			4. Jumlah rekomendasi/prakarsa Indonesia dalam mendukung upaya perdamaian di kawasan Asia Timur dan Pasifik	5	14 ^{K1}			

SUB BIDANG PEMBANGUNAN : POLITIK LUAR NEGERI

PRIORITAS SUB BIDANG : PEMANTAPAN DIPLOMASI DAN KERJASAMA INTERNASIONAL

NO	FOKUS PRIORITAS / KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010 - 2014 (Rp. Miliar)
				2010	2014			
			5. % fasilitasi untuk sidang/pameran/forum bisnis (<i>Trade, Tourism and Investment</i>)	100%	100%			
			6. Tingkat penanganan isu <i>illegal migrant</i> dan <i>human trafficking</i> serta isu-isu lainnya	25%	25%			
			7. Jumlah pelaksanaan koordinasi teknis	30	200 ^{KI}			
6.2	Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri di Kawasan Asia Selatan dan Tengah	Terlaksananya peran Indonesia dalam kerjasama di bidang politik, keamanan, ekonomi, dan sosial budaya dengan negara-negara di kawasan Asia Selatan dan Tengah	1. % fasilitasi penyelenggaraan kerjasama 2. Jumlah dokumen implementasi kesepakatan 3. Jumlah kunjungan/pernyataan dukungan Kepala Negara/Pemerintahan dan Pejabat Tinggi dari/ke negara-negara di kawasan Asia Selatan dan Tengah 4. Jumlah rekomendasi/prakarsa Indonesia dalam mendukung upaya perdamaian di kawasan Asia Selatan dan Tengah 5. % fasilitasi untuk sidang/pameran/forum bisnis (<i>Trade, Tourism and Investment</i>) 6. Tingkat penanganan isu <i>illegal migrant</i> dan <i>human trafficking</i> serta isu-isu lainnya 7. Jumlah koordinasi teknis	100% 8 8 2 100% 25% 30	100% 52 ^{KI} 46 ^{KI} 16 ^{KI} 100% 25% 200 ^{KI}	Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri serta Optimalisasi Diplomasi di Kawasan Asia Pasifik dan Afrika	Kemenlu	18,8

SUB BIDANG PEMBANGUNAN : POLITIK LUAR NEGERI
PRIORITAS SUB BIDANG : PEMANTAPAN DIPLOMASI DAN KERJASAMA INTERNASIONAL

NO	FOKUS PRIORITAS / KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010 - 2014 (Rp. Miliar)
				2010	2014			
6.3	Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri di Kawasan Sub Sahara Afrika	Terlaksananya peran Indonesia dalam kerjasama di bidang politik, keamanan, ekonomi, dan sosial budaya dengan negara-negara di kawasan Sub Sahara Afrika	1. % fasilitasi penyelenggaraan kerjasama 2. Jumlah dokumen implementasi kesepakatan 3. Jumlah kunjungan/pernyataan dukungan Kepala Negara/Pemerintahan dan Pejabat Tinggi dari negara-negara di kawasan Sub Sahara Afrika dan pernyataan dukungan resmi dari negara-negara kawasan Sub Sahara Afrika terhadap NKRI 4. Jumlah rekomendasi/prakarsa Indonesia dalam mendukung upaya perdamaian di kawasan Sub Sahara Afrika 5. % fasilitasi untuk sidang/pameran/forum bisnis (<i>Trade, Tourism and Investment</i>) 6. Jumlah koordinasi teknis	100% 3 17 4 100% 30	100% 24 ^{KI} 92 ^{KI} 24 ^{KI} 100% 200 ^{KI}	Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri serta Optimalisasi Diplomasi di Kawasan Asia Pasifik dan Afrika	Kemenlu	22,4
6.4	Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri di Kawasan Timur Tengah	Terlaksananya peran Indonesia dalam kerjasama di bidang politik, keamanan, ekonomi, dan sosial budaya dengan negara-negara di kawasan Timur Tengah	1. % fasilitasi penyelenggaraan kerjasama 2. Jumlah dokumen implementasi kesepakatan 3. Jumlah kunjungan/pernyataan dukungan Kepala Negara/Pemerintahan dan Pejabat Tinggi dari negara-negara di kawasan Timur Tengah dan pernyataan dukungan resmi dari negara-negara kawasan Timur Tengah terhadap NKRI	100% 8 12	100% 52 ^{KI} 63 ^{KI}	Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri serta Optimalisasi Diplomasi di Kawasan Asia Pasifik dan Afrika	Kemenlu	18,4

SUB BIDANG PEMBANGUNAN : POLITIK LUAR NEGERI
PRIORITAS SUB BIDANG : PEMANTAPAN DIPLOMASI DAN KERJASAMA INTERNASIONAL

NO	FOKUS PRIORITAS / KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010 - 2014 (Rp. Miliar)
				2010	2014			
			4. Jumlah rekomendasi/prakarsa Indonesia dalam mendukung upaya perdamaian di kawasan Timur Tengah (Palestina, Irak, Lebanon dan Sudan)	6	38 ^{KI}			
			5. % fasilitasi untuk sidang/pameran/forum bisnis (<i>Trade, Tourism and Investment</i>)	100%	100%			
			6. Jumlah koordinasi teknis	30	200 ^{KI}			
6.5	Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri Melalui Kerjasama Intra Kawasan Asia Pasifik dan Afrika	Terlaksananya peran Indonesia dalam kerjasama di bidang politik, keamanan, ekonomi, dan sosial budaya di berbagai forum Kerjasama Intra Kawasan Asia Pasifik dan Afrika (APEC, ARF, ACD, NAAASP, AMED, SwPD, PIF, IOR-ARC, CTI, BIMP-EAGA, IMT-GT, dll)	1. Jumlah partisipasi Indonesia pada sidang/pertemuan	68	372 ^{KI}	Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri serta Optimalisasi Diplomasi di Kawasan Asia Pasifik dan Afrika	Kemenlu	41,0
			2. Tingkat penyampaian posisi Deliri dalam mencegah pencantuman isu separatisme di Indonesia dalam dokumen akhir sidang	100%	100%			
			3. Jumlah dokumen implementasi kesepakatan	8	48 ^{KI}			
			4. Jumlah penyelenggaraan sidang/sosialisasi/seminar mengenai kebijakan luar negeri RI	10	60 ^{KI}			
			5. Jumlah prakarsa/inisiatif/rekomendasi Indonesia yang diterima	11	61 ^{KI}			
			6. Jumlah koordinasi teknis	40	270 ^{KI}			
6.6	Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri di Kawasan Amerika Utara dan Tengah	Terlaksananya peran Indonesia dalam kerjasama di bidang politik, keamanan, ekonomi, dan sosial budaya dengan negara-negara di Kawasan Amerika Utara dan Tengah	1. Jumlah penyelenggaraan pertemuan di Indonesia	12	74 ^{KI}	Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri serta Optimalisasi Diplomasi di Kawasan Amerika dan Eropa	Kemenlu	11,6
			2. Jumlah penyelenggaraan pertemuan di negara-negara kawasan Amerika Utara dan Tengah	19	99 ^{KI}			
			3. Jumlah kunjungan pejabat tinggi dan senior dari/ke negara-negara di kawasan Amerika Utara dan Tengah	6	40 ^{KI}			
			4. Jumlah dokumen implementasi kesepakatan	15	89 ^{KI}			

SUB BIDANG PEMBANGUNAN : POLITIK LUAR NEGERI
PRIORITAS SUB BIDANG : PEMANTAPAN DIPLOMASI DAN KERJASAMA INTERNASIONAL

NO	FOKUS PRIORITAS / KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010 - 2014 (Rp. Miliar)
				2010	2014			
			5. % fasilitasi untuk pameran/forum bisnis di bidang ekonomi, perdagangan, investasi dan pariwisata	100%	100%			
			6. Jumlah koordinasi teknis (interdep)	90	482 ^{KI}			
			7. Jumlah keikutsertaan dalam pameran dan kegiatan kebudayaan di negara-negara Amerika Utara dan Tengah	-	32 ^{KI}			
6.7	Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri di Kawasan Amerika Selatan dan Karibia	Terlaksananya peran Indonesia dalam kerjasama di bidang politik, keamanan, ekonomi, dan sosial budaya dengan negara-negara di kawasan Amerika Selatan dan Karibia	1. Jumlah penyelenggaraan pertemuan di Indonesia	4	16 ^{KI}	Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri serta Optimalisasi Diplomasi di Kawasan Amerika dan Eropa	Kemenlu	10,9
			2. Jumlah penyelenggaraan pertemuan di negara-negara kawasan Amerika Selatan dan Karibia	6	32 ^{KI}			
			3. Jumlah kunjungan pejabat tinggi dari/ke negara-negara di kawasan Amerika Selatan dan Karibia	5	31 ^{KI}			
			4. Jumlah dokumen implementasi kesepakatan	11	59 ^{KI}			
			5. % fasilitasi untuk pameran/forum bisnis di bidang ekonomi, perdagangan, investasi dan pariwisata	100%	100%			
			6. Jumlah koordinasi teknis (interdep)	30	144 ^{KI}			
			7. Jumlah keikutsertaan dalam pameran dan kegiatan kebudayaan di negara-negara Amerika Selatan dan Karibia	1	25 ^{KI}			

SUB BIDANG PEMBANGUNAN : POLITIK LUAR NEGERI
PRIORITAS SUB BIDANG : PEMANTAPAN DIPLOMASI DAN KERJASAMA INTERNASIONAL

NO	FOKUS PRIORITAS / KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010 - 2014 (Rp. Miliar)
				2010	2014			
6.8	Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri di Kawasan Eropa Barat	Terlaksananya peran Indonesia dalam kerjasama di bidang politik, keamanan, ekonomi, dan sosial budaya dengan negara-negara di kawasan Eropa Barat	1. Jumlah penyelenggaraan pertemuan di Indonesia 2. Jumlah penyelenggaraan pertemuan di negara-negara kawasan Eropa Barat 3. Jumlah kunjungan tingkat pejabat tinggi dari/ke negara-negara di kawasan Eropa Barat 4. Jumlah dokumen implementasi kesepakatan 5. % fasilitasi untuk pameran/forum bisnis di bidang ekonomi, perdagangan, investasi dan pariwisata 6. Jumlah koordinasi teknis (interdep) 7. Jumlah keikutsertaan dalam pameran dan kegiatan kebudayaan di negara-negara Eropa Barat	8 7 10 9 100% 35 2	42 ^{KI} 42 ^{KI} 55 ^{KI} 48 ^{KI} 100% 187 ^{KI} 26 ^{KI}	Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri serta Optimalisasi Diplomasi di Kawasan Amerika dan Eropa	Kemenlu	10,9
6.9	Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri di Kawasan Eropa Tengah dan Timur	Terlaksananya peran Indonesia dalam kerjasama di bidang politik, keamanan, ekonomi, dan sosial budaya dengan negara-negara di Kawasan Eropa Tengah dan Timur	1. Jumlah penyelenggaraan pertemuan di Indonesia 2. Jumlah penyelenggaraan pertemuan di negara-negara kawasan Eropa Tengah dan Timur 3. Jumlah kunjungan tingkat pejabat tinggi dari/ke negara-negara di kawasan Eropa Tengah dan Timur 4. Jumlah dokumen implementasi kesepakatan 5. % fasilitasi untuk pameran/forum bisnis di bidang ekonomi, perdagangan, investasi dan pariwisata 6. Jumlah koordinasi teknis (interdep)	5 5 2 10 100% 25	30 ^{KI} 33 ^{KI} 13 ^{KI} 61 ^{KI} 100% 137 ^{KI}	Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri serta Optimalisasi Diplomasi di Kawasan Amerika dan Eropa	Kemenlu	10,7
6.10	Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri Melalui Kerjasama Intrakawasan Amerika dan Eropa	Terlaksananya peran Indonesia dalam kerjasama di bidang politik, keamanan, ekonomi, dan sosial budaya di Organisasi Intrakawasan Amerika dan Eropa	1. Jumlah kerjasama yang disepakati antara RI melalui kerjasama intrakawasan Amerika dan Eropa 2. Jumlah prakarsa/rekomendasi Indonesia dalam kerjasama FEALAC	11 6	64 ^{KI} 34 ^{KI}	Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri serta Optimalisasi Diplomasi di Kawasan Amerop	Kemenlu	24,4

SUB BIDANG PEMBANGUNAN : POLITIK LUAR NEGERI
PRIORITAS SUB BIDANG : PEMANTAPAN DIPLOMASI DAN KERJASAMA INTERNASIONAL

NO	FOKUS PRIORITAS / KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010 - 2014 (Rp. Miliar)
				2010	2014			
			3. Jumlah prakarsa/rekomendasi Indonesia dalam kerjasama ASEM	4	20 ^{KI}			
			4. Jumlah penyelenggaraan sidang/pertemuan dalam rangka optimalisasi diplomasi intrakawasan Amerika dan Eropa	12	65 ^{KI}			
			5. Jumlah sidang/pertemuan yang dihadiri dalam rangka optimalisasi diplomasi intrakawasan Amerika dan Eropa	37	195 ^{KI}			
			6. % fasilitasi untuk pameran/forum bisnis di bidang ekonomi, perdagangan, investasi dan pariwisata dalam kerjasama intra kawasan	100%	100%			
			7. Jumlah koordinasi teknis (interdep)	30	165 ^{KI}			
			8. Jumlah keikutsertaan dalam pameran dan kegiatan kebudayaan di kawasan Amerika dan Eropa	2	12 ^{KI}			
6.11	Kegiatan Koordinasi Kerjasama Asia, Pasifik dan Afrika	Terselenggaranya Koordinasi Kebijakan Kerjasama Asia, Pasifik dan Afrika	1. Jumlah Rapat Koordinasi peningkatan kualitas kerjasama Asia, Pasifik dan Afrika	12	60 ^{KI}	Peningkatan Koordinasi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	Kemenko Polhukam	2,8
			2. Jumlah pemantauan dan evaluasi	4	20 ^{KI}			

SUB BIDANG PEMBANGUNAN : POLITIK LUAR NEGERI
PRIORITAS SUB BIDANG : PEMANTAPAN DIPLOMASI DAN KERJASAMA INTERNASIONAL

NO	FOKUS PRIORITAS / KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010 - 2014 (Rp. Miliar)
				2010	2014			
6.12	Kegiatan Koordinasi Kerjasama Amerika dan Eropa	Terselenggaranya Koordinasi Kebijakan Kerjasama Amerika dan Eropa	1. Jumlah Rapat Koordinasi peningkatan kualitas kerjasama Amerika dan Eropa 2. Jumlah pemantauan dan evaluasi	12 4	60 ^{K)} 20 ^{K)}	Peningkatan Koordinasi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	Kemenko Polhukam	2,8
7	Peningkatan Pelaksanaan Diplomasi Ekonomi (***)	Terwujudnya perluasan akses dan meningkatnya kerjasama multilateral di bidang ekonomi, perdagangan, investasi, budaya dan pariwisata, serta pembangunan	Tingkat keberhasilan rekomendasi/ gagasan Pemri yang diterima dalam sidang terkait isu ekonomi, perdagangan, investasi, budaya dan pariwisata, serta pembangunan	70%	70%			22,8
7.1	Kerjasama Multilateral Terkait Isu Perdagangan, Perindustrian, Investasi, dan HAKI	Terlaksananya partisipasi Indonesia dalam setiap forum kerja sama multilateral tentang Perdagangan, Perindustrian, Investasi, dan HAKI	1. Jumlah posisi Pemri yang disampaikan dalam sidang internasional 2. Jumlah koordinasi teknis 3. Jumlah penyelenggaraan pertemuan/kerjasama internasional 4. Jumlah partisipasi Indonesia dalam sidang internasional	17 21 2 10	107 ^{K)} 109 ^{K)} 10 ^{K)} 60 ^{K)}	Peningkatan Peran dan Diplomasi Indonesia di Bidang Multilateral	Kemenlu	22,8
8	Peningkatan Peran Serta Indonesia Dalam Kerjasama Selatan-Selatan	Meningkatnya dukungan bagi Indonesia dari negara-negara di kawasan Selatan	Tingkat persepsi positif Negara-negara di kawasan Selatan terhadap Indonesia	Baik	Baik			64,7

SUB BIDANG PEMBANGUNAN : POLITIK LUAR NEGERI
PRIORITAS SUB BIDANG : PEMANTAPAN DIPLOMASI DAN KERJASAMA INTERNASIONAL

NO	FOKUS PRIORITAS / KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010 - 2014 (Rp. Miliar)
				2010	2014			
8.1	Penguatan Citra Indonesia Melalui Kerjasama Teknik	Terlaksananya kebijakan di bidang kerjasama teknik yang berkualitas	1. Jumlah koordinasi dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan kerjasama teknik	-	28 ^{KI}	Optimalisasi Informasi dan Diplomasi Publik	Kemenlu	32,0
			2. Jumlah pelaksanaan kegiatan kerjasama teknis di berbagai bidang dengan negara-negara sahabat.	2	10 ^{KI}			
			3. Jumlah pelaksanaan kegiatan kerjasama teknik yang diberikan Indonesia dalam rangka kerjasama Selatan-Selatan	7	27 ^{KI}			
			4. % Penguatan entitas untuk melakukan koordinasi dan sinergi antar lembaga dalam melaksanakan kerjasama Selatan-Selatan	100%	100%			
8.2	Kerjasama Multilateral Terkait Isu Sosial Budaya dan Organisasi Internasional Negara Berkembang	Terlaksananya partisipasi Indonesia dalam setiap forum kerja sama multilateral tentang sosial budaya dan organisasi internasional negara berkembang	1. Jumlah posisi Pemri yang disampaikan dalam sidang internasional	22	107 ^{KI}	Peningkatan Peran dan Diplomasi Indonesia di Bidang Multilateral	Kemenlu	32,7
			2. Jumlah koordinasi teknis	16	80 ^{KI}			
			3. Jumlah penyelenggaraan pertemuan/kerjasama internasional	-	2 ^{KI}			
			4. Jumlah partisipasi Indonesia dalam sidang internasional	23	133 ^{KI}			
			5. Jumlah pertemuan tentang LSM Asing	20	106 ^{KI}			
			6. Tersusunnya grand design kerjasama Selatan-Selatan		Tersusunnya grand design kerjasama kerjasama Selatan-Selatan			
TOTAL								1.808,6

SUB BIDANG PEMBANGUNAN : POLITIK LUAR NEGERI
PRIORITAS SUB BIDANG : PEMANTAPAN DIPLOMASI DAN KERJASAMA INTERNASIONAL

NO	FOKUS PRIORITAS / KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010 - 2014 (Rp. Miliar)
				2010	2014			

Keterangan :

(*) Di dalam fokus Peningkatan Peran Indonesia Dalam Menjaga Keamanan Nasional dan Menciptakan Perdamaian Dunia juga terdapat :

1. Kegiatan *Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri di Kawasan Timur Tengah* program Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri serta Optimalisasi Diplomasi di Kawasan Asia Pasifik dan Afrika yang juga terdapat pada fokus Pemantapan Kemitraan Strategis di Kawasan Asia Pasifik dan Afrika, serta Kawasan Amerika dan Eropa
2. Kegiatan *Optimalisasi Diplomasi terkait dengan Perjanjian Politik, Keamanan Kewilayahan dan Kelautan* program Optimalisasi Diplomasi Terkait dengan Pengelolaan Hukum dan Perjanjian Internasional yang juga terdapat pada fokus Pelaksanaan Diplomasi Perbatasan yang Terkoordinasi untuk Menjaga Keutuhan Wilayah Darat, Laut, dan Udara Indonesia serta Menjaga Kekayaan Sumber Daya Alam Nasional
3. Kegiatan *Kerjasama Multilateral Terkait Isu Pembangunan Ekonomi, Keuangan, dan Lingkungan Hidup* program Peningkatan Peran dan Diplomasi Indonesia di Bidang Multilateral pada fokus Peningkatan Peran Indonesia Dalam Pemajuan Demokrasi, HAM, Lingkungan Hidup, dan Perlindungan Budaya
4. Kegiatan *Kerjasama Multilateral Terkait Isu Perdagangan, Perindustrian, Investasi, dan HAK* program Peningkatan Peran dan Diplomasi Indonesia di Bidang Multilateral yang juga terdapat pada fokus Peningkatan Pelaksanaan Diplomasi Ekonomi
5. Kegiatan *Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri di Kawasan Asia Timur dan Pasifik* program Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri serta Optimalisasi Diplomasi di Kawasan Asia Pasifik dan Afrika yang juga terdapat pada fokus Pemantapan Kemitraan Strategis di Kawasan Asia Pasifik dan Afrika, serta Kawasan Amerika dan Eropa
6. Kegiatan *Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri di Kawasan Asia Selatan dan Tengah* program Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri serta Optimalisasi Diplomasi di Kawasan Asia Pasifik dan Afrika yang juga terdapat pada fokus Pemantapan Kemitraan Strategis di Kawasan Asia Pasifik dan Afrika, serta Kawasan Amerika dan Eropa
7. Kegiatan *Penguatan Citra Indonesia Melalui Diplomasi Publik* program Optimalisasi Informasi dan Diplomasi Publik yang juga terdapat pada fokus Peningkatan Peran Indonesia dalam Pemajuan Demokrasi, HAM, Lingkungan Hidup, dan Perlindungan Budaya

(**) Di dalam fokus Peningkatan Peran Indonesia Dalam Pemajuan Demokrasi, HAM, Lingkungan Hidup, dan Perlindungan Budaya juga terdapat :

1. Kegiatan *Kerjasama Multilateral Terkait Isu Perdagangan, Perindustrian, Investasi, dan HAK* program Peningkatan Peran dan Diplomasi Indonesia di Bidang Multilateral yang juga terdapat pada fokus Peningkatan Pelaksanaan Diplomasi Ekonomi

(***) Di dalam fokus Pelaksanaan Peningkatan Pelaksanaan Diplomasi Ekonomi juga terdapat :

1. Kegiatan *Kerjasama Multilateral Terkait Isu Pembangunan Ekonomi, Keuangan, dan Lingkungan Hidup* program Peningkatan Peran dan Diplomasi Indonesia di Bidang Multilateral pada fokus Peningkatan Peran Indonesia Dalam Pemajuan Demokrasi, HAM, Lingkungan Hidup, dan Perlindungan Budaya
2. Kegiatan *Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri Melalui Kerjasama Intra Kawasan Asia Pasifik dan Afrika* program Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri serta Optimalisasi Diplomasi di Kawasan Asia Pasifik dan Afrika yang juga terdapat pada fokus Pemantapan Kemitraan Strategis di Kawasan Asia Pasifik dan Afrika, serta Kawasan Amerika dan Eropa

^{k)} Angka kumulatif 5 tahun (2010-2014)



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2010
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH NASIONAL
(RPJMN)
TAHUN 2010--2014**

**BUKU II
MEMPERKUAT SINERGI ANTARBIDANG PEMBANGUNAN**

**BAB VII
PERTAHANAN DAN KEAMANAN**

**Diperbanyak Oleh:
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS)
2010**



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
BAB VII BIDANG PERTAHANAN DAN KEAMANAN	II.7-1
7.1 Kondisi Umum	II.7-2
7.1.1 Lingkungan Strategis-Kawasan Regional	II.7-2
7.1.2 Perlombaan Senjata di Kawasan Regional	II.7-3
7.1.3 Kepentingan dan Kebijakan Negara Adidaya	II.7-3
7.1.4 Wilayah Laut Yurisdiksi Nasional.....	II.7-4
7.1.5 Perbatasan Negara	II.7-4
7.1.6.Gangguan Keamanan di Wilayah Perbatasan dan Pulau Terdepan	II.7-5
7.1.7 Kejahatan Trans-Nasional.....	II.7-6
7.1.8 Penyalahgunaan Narkoba	II.7-6
7.1.9 Perdagangan Manusia (<i>human trafficking</i>)	II.7-8
7.1.10 Terorisme	II.7-9
7.1.11 Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	II.7-10
7.1.12 Kinerja Lembaga Kepolisian.....	II.7-10
7.1.13 Postur Pertahanan.....	II.7-11
7.2 Permasalahan dan Sasaran Pembangunan.....	II.7-13
7.2.1 Permasalahan.....	II.7-13
7.2.2 Sasaran pembangunan	II.7-20
7.3 Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan.....	II.7-23
7.3.1 Arah Kebijakan Pembangunan	II.7-23
7.3.2 Strategi Pembangunan	II.7-24



BAB VII

BIDANG PERTAHANAN DAN KEAMANAN

Keamanan nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan perwujudan dari salah satu tujuan bernegara, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Hal ini merupakan prasyarat bagi terwujudnya tiga tujuan bernegara lainnya sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD Tahun 1945. Sebagai bagian dari masyarakat dunia, keamanan nasional NKRI yang mencakup pertahanan negara, keamanan dalam negeri, keamanan dan ketertiban masyarakat, serta keamanan sosial baik secara langsung maupun tidak langsung sangat dipengaruhi oleh dinamika politik, ekonomi, kesejahteraan, sosial, dan budaya di dalam negeri, serta dinamika keamanan di kawasan Regional dan Internasional.

Meskipun dalam jangka waktu lima tahun ke depan kemungkinan terjadinya perang sangat kecil, sebagai negara berdaulat Indonesia harus mempersiapkan kekuatan militer, agar sewaktu-waktu siap untuk dikerahkan; apabila terjadi ancaman militer terhadap kedaulatan NKRI. Dari pengalaman beberapa dekade terakhir ini, Indonesia juga pernah mengalami embargo persenjataan dari luar negeri. Berdasarkan pengalaman pahit tersebut, kemampuan serta pemberdayaan industri pertahanan nasional perlu ditingkatkan, agar mampu mandiri dan tidak tergantung kepada pihak luar. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia, yang dua pertiga luas wilayahnya merupakan perairan/laut; maka tidak mengherankan apabila banyak terjadi gangguan keamanan dan pelanggaran hukum di laut. Oleh karena itu diperlukan upaya khusus untuk mencegah dan menanggulangi gangguan keamanan dan pelanggaran hukum di wilayah laut yurisdiksi nasional Indonesia.

Di lain pihak, meskipun telah banyak upaya dan prestasi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dicapai selama lima tahun terakhir ini, masih diperlukan upaya dan kerja keras meningkatkan rasa aman dan ketertiban masyarakat guna memenuhi tuntutan dan aspirasi masyarakat Indonesia. Selama lima tahun terakhir, pemerintah juga telah berhasil menangani berbagai konflik sosial dan gangguan keamanan di berbagai wilayah tanah air. Namun, potensi konflik dan gangguan terhadap keamanan dalam negeri belum hilang sama sekali dan telah berkembang sesuai dengan kemajuan teknologi dan demokrasi, maka diperlukan upaya untuk memodernisasi kemampuan deteksi dini keamanan nasional. Lebih lanjut dapat dikemukakan bahwa seiring dengan semakin berkembangnya spektrum ancaman terhadap keamanan nasional, institusi yang menangani kebijakan keamanan nasional juga harus mampu berkoordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan terkait. Oleh karena itu, diperlukan upaya guna meningkatkan kualitas kebijakan keamanan nasional.

Sesuai dengan uraian tersebut di atas, dalam RPJMN 2010--2014; agar

pembangunan di bidang Pertahanan dan Keamanan mampu mendukung pencapaian visi Indonesia yang sejahtera, demokratis, dan berkeadilan; kebijakan pembangunan pertahanan dan keamanan diarahkan kepada terwujudnya “Peningkatan kemampuan pertahanan negara; dan kondisi keamanan dalam negeri yang kondusif; sehingga aktivitas masyarakat dan dunia usaha dapat berlangsung secara aman dan nyaman; dengan strategi : (1) peningkatan kemampuan pertahanan mencapai *minimum essential force*; (2) pemberdayaan industri pertahanan nasional; (3) pencegahan dan penanggulangan gangguan keamanan dan pelanggaran hukum di laut (perompakan, *illegal fishing* dan *illegal logging*); (4) peningkatan rasa aman dan ketertiban masyarakat; (5) modernisasi deteksi dini keamanan nasional; dan (6) peningkatan kualitas kebijakan keamanan nasional.

7.1 Kondisi Umum

Dewasa ini kepentingan ekonomi serta penguasaan sumber daya alam, migas, dan air bersih lebih mewarnai berbagai permasalahan keamanan nasional suatu negara, termasuk Indonesia. Ancaman dan gangguan terhadap keamanan nasional dilancarkan tidak hanya oleh negara, tetapi juga oleh aktor-aktor bukan negara (*non-state actors*). Secara nyata bentuk ancaman dan gangguan terhadap keamanan nasional suatu negara termasuk Indonesia, telah sedemikian berkembang tidak hanya berbentuk ancaman militer, tetapi juga berbentuk ancaman non-militer dengan menggunakan teknologi canggih dan bersifat lintas negara. Kompleksitas permasalahan keamanan nasional acap kali timbul bersamaan dengan munculnya isu-isu global seperti HAM, demokrasi, lingkungan hidup, *good governance*, dan terorisme. Penggunaan kombinasi operasi *soft power* melalui diplomasi, ekonomi, finansial, sosial-budaya, dan media, dengan operasi *hard power* melalui pengerahan militer cenderung digunakan oleh negara-negara tertentu untuk memaksakan kepentingannya terhadap negara lain. Pada akhirnya segala kerawanan tersebut berdampak merugikan terhadap keutuhan wilayah, kedaulatan negara, kesejahteraan masyarakat, lingkungan hidup dan seluruh peri kehidupan lainnya. Semenjak kemerdekaan sampai dengan saat ini, bangsa dan negara Indonesia telah berulang kali mengalami pergulatan dengan permasalahan keamanan nasional seperti pemberontakan bersenjata yang melawan konstitusi negara (*insurgency*). Meskipun telah dilakukan berbagai upaya, baik yang bersifat pendekatan kesejahteraan maupun pendekatan keamanan, permasalahan *insurgency* ini belum sepenuhnya dapat dituntaskan dan masih menyisakan permasalahan bagi keutuhan dan kedaulatan NKRI. Secara terperinci kondisi umum pertahanan dan keamanan yang terkait dengan NKRI dapat dijabarkan sebagai berikut.

7.1.1 Lingkungan Strategis-Kawasan Regional.

Kawasan regional di sekitar Indonesia terus dibayang-bayangi noktah-noktah rawan (*hot spot*). Pada saat ini, kemampuan dan daya jelajah pesawat tempur yang



dimiliki oleh negara tetangga mampu mencapai hampir seluruh wilayah Indonesia termasuk Ibukota Jakarta. Demikian juga dengan peningkatan kemampuan armada negara tetangga dari laut lepas ke samudra (*green Water Navy to Blue Water Navy*) yang memungkinkan armada negara tetangga tersebut mampu menjangkau Natuna dan bahkan Papua. Selain itu, cakupan zona pengawasan maritim negara tetangga dengan rentang 1.000,0 NM dari wilayah perbatasan negara tetangga tersebut sehingga dapat menjangkau seluruh wilayah Indonesia tentu akan berdampak pada kedaulatan NKRI. Pembangunan pangkalan laut dengan biaya USD 8,0 milyar oleh negara tetangga di Asia Selatan juga memungkinkan Armada Laut negara tersebut dengan mudah menjangkau pantai barat, utara dan timur Pulau Sumatra. Sementara itu, hubungan bilateral antara Indonesia dengan Singapura masih terganjal masalah *Defense Cooperation Agreement* (DCA). Sengketa wilayah Ambalat juga merupakan masalah yang belum terselesaikan dalam hubungan bilateral antara Indonesia dengan Malaysia.

7.1.2 Perlombaan Senjata di Kawasan Regional.

Potensi ketidakstabilan di kawasan sekitar Indonesia tidak terlepas dari kepentingan, persaingan, dan ketegangan negara-negara tertentu. Belanja militer negara-negara di kawasan sekitar Indonesia yang relatif besar berdampak pada perubahan kekuatan dan kemampuan militernya dengan sangat mencolok serta memunculkan kecenderungan terjadinya pergeseran kekuatan regional. Kebangkitan negara-negara besar di Asia dalam bidang ekonomi dan militer, revitalisasi peran salah satu negara maju di Asia dalam bidang pertahanan dan keamanan, serta pengembangan nuklir oleh negara-negara kawasan Asia turut memicu peningkatan kekuatan, kemampuan, dan gelar militer di kawasan ini yang pada gilirannya dapat menjadi potensi ancaman bagi Indonesia, termasuk Kepulauan Natuna yang memiliki cadangan gas yang besar. Selain itu, ketegangan di kawasan Asia Selatan yang berhadapan dengan wilayah Indonesia bagian barat juga tidak kunjung mereda dan bahkan semakin meruncing dengan adanya kejadian terorisme. Ketegangan di kawasan Asia Selatan ini menimbulkan kekhawatiran akan pecahnya perang dan perlombaan senjata yang berbasis nuklir karena beberapa negara di kawasan ini memiliki kemampuan penguasaan nuklir sebagai persenjataan.

7.1.3 Kepentingan dan Kebijakan Negara Adidaya.

Kepentingan dan kebijakan negara adidaya juga turut mewarnai kondisi keamanan nasional NKRI dan kawasan sekitar Indonesia. Percobaan peluncuran roket *multi stage* dan pengembangan nuklir oleh negara-negara di kawasan Asia menjadi alasan yang kuat bagi negara adidaya untuk tetap mempertahankan kekuatannya di kawasan Asia. Negara-negara adidaya ini menerapkan kebijakan yang bertumpu pada penggunaan *join operation* yaitu *soft power* melalui diplomasi, ekonomi, finansial, sosial-budaya, media, dan embargo dengan *hard power* melalui pengerahan militer, penggelaran Misil Balistik Antar Benua yang mempunyai kemampuan *Multi Warheads*

dan *Multi Target*, dan penggunaan pesawat Armada Reconnaissance dan Pembom Strategis. Pada masa lalu Indonesia pernah merasakan pengalaman pahit diembargo oleh beberapa negara tersebut.

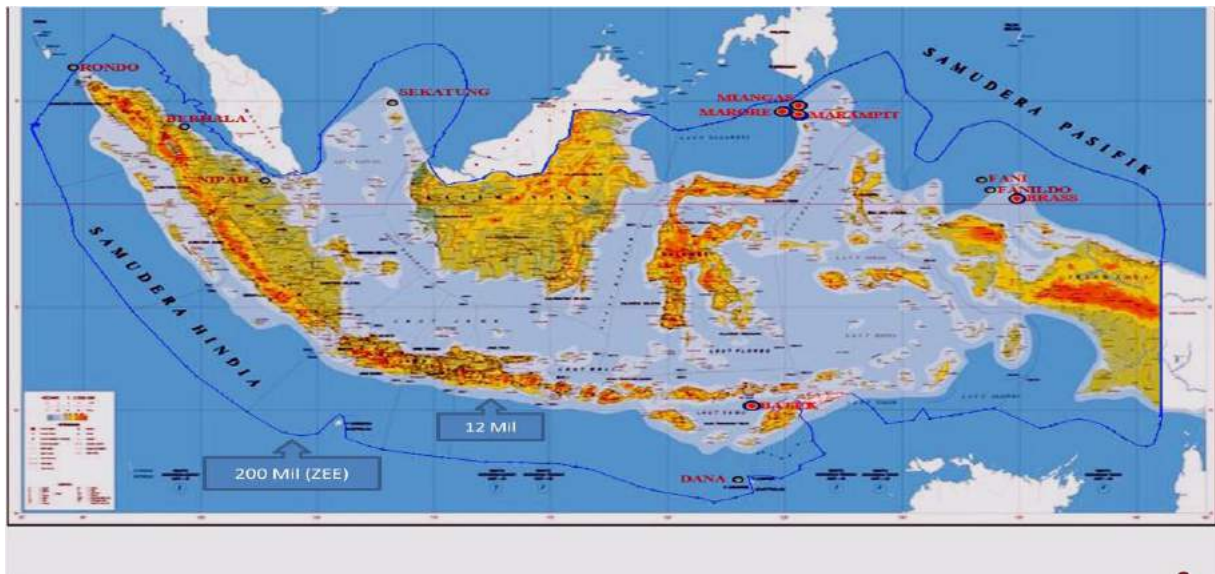
7.1.4 Wilayah Laut Yurisdiksi Nasional.

Semenjak disahkannya Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut 1982 (*United Nation Convention on Law of the Sea - UNCLOS 1982*) wilayah Indonesia, terutama wilayah yurisdiksi laut, secara signifikan bertambah luas dan oleh dunia. NKRI diakui sebagai negara kepulauan (*archipelagic state*). Sebagai konsekuensi konvensi UNCLOS 1982, Indonesia melalui PP No. 37 telah menentukan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) untuk lintas kapal dan pesawat udara negara asing, yaitu ALKI I, ALKI II dan ALKI III. Selain ALKI tersebut, Selat Malaka juga merupakan salah satu kawasan lalu lintas pelayaran internasional tersibuk dan strategis di dunia. Saat ini Selat Malaka dilalui oleh sekitar 50.000 kapal/tahun yang mengangkut berbagai komoditas termasuk minyak dan gas. Secara berturut-turut dalam kurun waktu 4 tahun terakhir aksi perompakan di perairan wilayah yurisdiksi laut Indonesia terus menurun yaitu sebanyak 94 kali pada tahun 2004, 79 kali pada tahun 2005, 50 kali pada tahun 2006, dan 43 kali pada tahun 2007. Selain itu, aksi perompakan dan gangguan keamanan di Selat Malaka juga cenderung menurun yaitu, 38 kali pada tahun 2004, 12 kali pada tahun 2005, 11 kali pada tahun 2006, dan 7 kali pada tahun 2007. Meskipun gangguan keamanan cenderung menurun, perairan wilayah yurisdiksi laut Indonesia, termasuk ALKI dan Selat Malaka, masih dianggap rawan tindak kejahatan dan aktivitas perompakan, terorisme, penyelundupan senjata, dan polusi.

7.1.5 Perbatasan Negara.

Sebagai negara kepulauan, Indonesia berbatasan darat dan atau laut yang didasarkan pada 185 titik dasar dengan 10 (sepuluh) negara tetangga, yaitu Australia, India, Kepulauan Palau, Malaysia, Papua Nugini, Filipina, Singapura, Thailand, Timor Leste, dan Vietnam. Penegasan garis batas darat antara Indonesia dan Malaysia di Pulau Kalimantan sepanjang 2.004 km sebenarnya telah selesai pada tahun 2000, namun saat ini masih menyisakan 10 (sepuluh) daerah bermasalah. Demikian juga dengan perbatasan darat antara Indonesia dan Papua Nugini sepanjang 780 km yang terdiri atas batas darat kurang lebih 663 km dan Sungai Fly sepanjang 107 km. Saat ini masih terdapat permasalahan di daerah Wara Smoll. Untuk perbatasan darat Indonesia dengan Timor Leste sepanjang kurang lebih 269 km masih menyisakan 3 (tiga) daerah yang dipermasalahkan. Selain masalah perbatasan darat, perbatasan laut dengan beberapa negara tetangga juga masih belum dapat disepakati sepenuhnya. Secara empiris, konflik antarnegara di dunia seringkali disebabkan oleh sengketa perbatasan, seperti yang terjadi di wilayah Ambalat yang diperebutkan oleh Indonesia dan Malaysia.

GAMBAR 7. 1
PETA WILAYAH NKRI



Sumber : Kementerian Pertahanan

7.1.6 Gangguan Keamanan di Wilayah Perbatasan dan Pulau Terdepan.

Dalam beberapa tahun terakhir ini, pembangunan pos-pos pengamanan perbatasan dan pulau-pulau terdepan (terluar) beserta penggelaran aparat keamanan telah mampu menurunkan intensitas pelanggaran batas wilayah negara dan gangguan keamanan di wilayah perbatasan. Namun dengan jarak antar pos perbatasan yang rata-rata masih 50 km dan pembangunan pos pulau terdepan (terluar) yang baru difokuskan di 12 pulau, tingkat kerawanan di wilayah perbatasan dan pulau terdepan (terluar) lainnya masih relatif tinggi. Gangguan keamanan yang masih terjadi di wilayah perbatasan dan pulau terdepan (terluar) terutama dalam bentuk aktivitas ilegal berupa pencurian sumber daya alam dan pemindahan patok-patok perbatasan. Keterbatasan ekonomi masyarakat di wilayah perbatasan dan pulau terdepan (terluar) juga sering dimanfaatkan oleh pihak asing untuk mengeruk sumber daya alam secara ilegal khususnya pembalakan liar. Berbeda dengan negara-negara tetangga, Indonesia juga terkesan belum sepenuhnya menempatkan wilayah perbatasan dan pulau terdepan (terluar) sebagai pusat-pusat pertumbuhan sehingga masyarakat di wilayah perbatasan seringkali harus berorientasi ke negara lain, terutama dalam akses ekonomi dan informasi, yang kesemua ini berpotensi menurunkan rasa kebangsaan. Kerawanan di wilayah perbatasan dan pulau terdepan (terluar) sangat terkait dengan belum efektifnya keterpaduan pengelolaan wilayah perbatasan dan pulau terdepan (terluar). Sinergi antara pemerintah daerah perbatasan dan pulau terdepan (terluar) dengan instansi vertikal terkesan berjalan sendiri-sendiri, partial dan tidak utuh.

7.1.7 Kejahatan Trans-Nasional

Posisi geografis yang strategis, dan dengan perbatasan darat maupun laut yang belum sepenuhnya terjaga, serta pengawasan bandara dan pelabuhan laut yang belum seluruhnya ketat telah menjadikan wilayah dan penduduk Indonesia sebagai bagian mata rantai kejahatan lintas negara, seperti narkoba, perdagangan dan penyelundupan manusia (*human trafficking*), dan terorisme. Bentuk lain kejahatan lintas negara yang berdampak sangat merugikan suatu negara adalah kejahatan lintas negara terorganisasi yang biasanya dikendalikan oleh aktor bukan negara (*non-state actors*). Kejahatan terorganisasi lintas negara secara langsung sangat mengganggu rasa aman masyarakat dan kemanusiaan, serta secara tidak langsung sangat merongrong keamanan dalam negeri, kedaulatan negara, pembangunan ekonomi, dan penegakan hukum. Terdapat berbagai bukti hubungan kuat antara pendanaan kelompok teroris dan separatis dengan keuntungan yang diperoleh dari kejahatan narkoba. Jenis kejahatan ini oleh panel Perserikatan Bangsa Bangsa dianggap sebagai 1 (satu) dari 10 (sepuluh) ancaman berbahaya bagi umat manusia. Meskipun masih dalam skala medium dan relatif belum masif, tidak dapat dimungkiri bahwa wilayah dan penduduk Indonesia merupakan salah satu simpul kejahatan narkoba, perdagangan perempuan dan anak, serta penyelundupan manusia, terorisme, dan berbagai bentuk kejahatan lintas negara terorganisasi.

7.1.8 Penyalahgunaan Narkoba

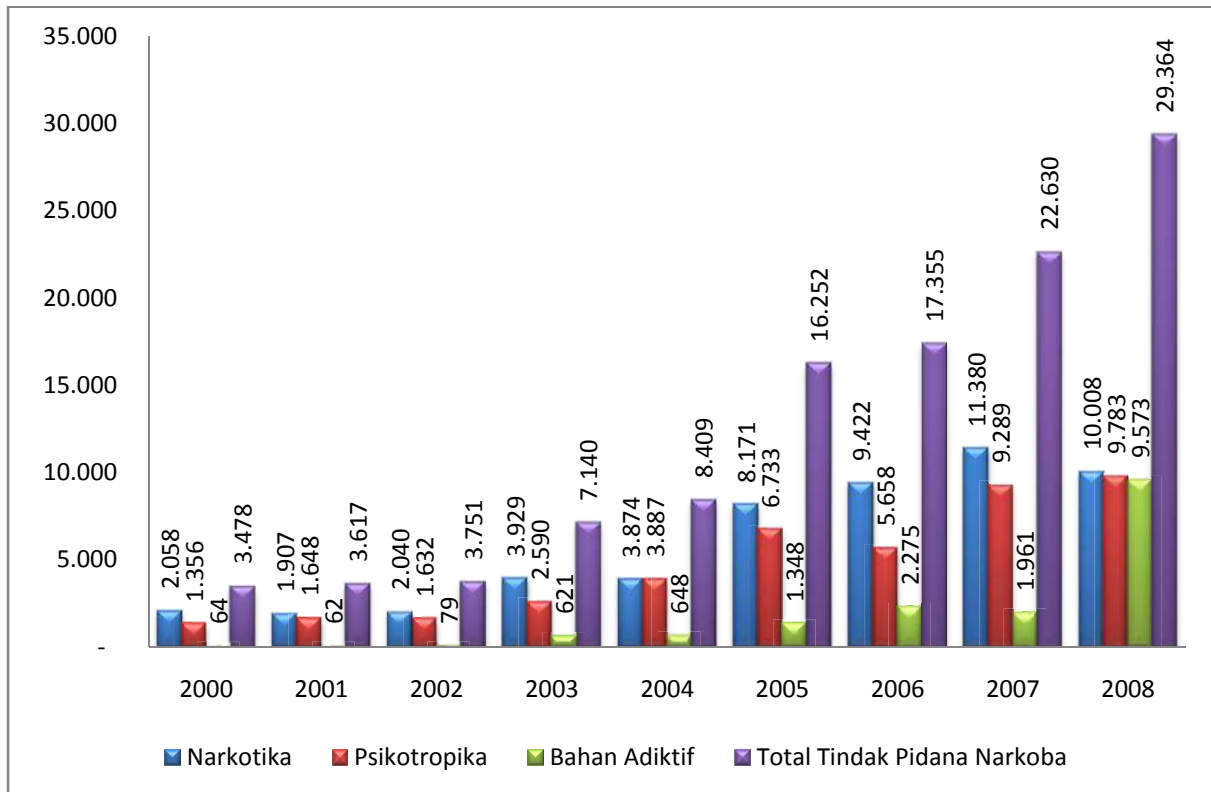
Dewasa ini Indonesia belum dapat sepenuhnya melepaskan diri dari ancaman kejahatan Narkoba. Prevalensi penyalahgunaan narkoba yang menunjukkan angka 1,5 – 1,9 % penduduk mengindikasikan bahaya kejahatan narkoba telah sampai pada tingkatan mengkhawatirkan. Kisaran harga narkoba yang tinggi dan keuntungan yang besar mengakibatkan bisnis dan penyalahgunaan Narkoba di Indonesia lebih marak jika dibandingkan dengan harga negara-negara Asia lainnya. Modus operandi kejahatan narkoba di wilayah hukum Indonesia tampaknya juga semakin canggih. Bahkan, berbagai temuan menunjukkan bahwa selain munculnya kecenderungan baru dengan memanfaatkan warga negara asing terutama yang berasal dari Iran, sindikat Afrika Barat telah bekerja sama dengan sindikat China dalam menjalankan bisnis narkoba di Indonesia. Selain itu, kelonggaran peraturan perundang-undangan dan ketidakmaksimalan pengawasan terhadap impor bahan baku narkoba sintesis semakin mempermudah pelaku untuk mendirikan laboratorium penghasil narkoba. Dengan demikian, Indonesia dapat dikatakan sebagai negara produsen, terutama narkoba sintesis dan ganja, sekaligus pasar potensial dalam perdagangan narkoba.

Dalam kurun waktu tahun 2000 sampai dengan pertengahan tahun 2008 kasus tindak pidana narkoba meningkat lebih dari 7 kali lipat, dengan kecenderungan tersangka semakin muda usianya. Jika pada tahun 2000 jumlah kasus hanya 3.748 kasus, pada tahun 2007 meningkat menjadi 22.630 kasus dan pada tahun 2008



mencapai 29.364 kasus. Sementara itu, jumlah tersangka di bawah umur 25 tahun yang berarti golongan muda, pelajar, dan mahasiswa proporsinya rata-rata mencapai 36,48 %. Berbagai upaya penegakan hukum bagi kejahatan narkoba terus dilakukan secara intensif terutama di kantong-kantong kejahatan narkoba. Dalam 5 tahun terakhir, puluhan ribu kasus narkoba berhasil diselesaikan, puluhan produsen gelap narkoba dalam skala kecil dan besar berhasil diungkap, dan lebih dari 70 orang diputus pidana mati, 5 di antaranya telah dieksekusi mati. Laporan *World Drug Report* tahun 2008 bahkan menempatkan Indonesia sebagai salah satu dari 10 negara terbesar melakukan penyitaan narkoba. Sementara itu, jumlah serta cakupan dan kualitas lembaga pelayanan terapi dan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba, baik yang dilakukan oleh masyarakat maupun oleh negara, seperti Unit Terapi dan Rehabilitasi BNN di Lido tercatat juga semakin meningkat. Namun, upaya dalam mengawasi dan mengendalikan peredaran gelap narkoba melalui penegakan hukum dan pemberantasan jaringan narkoba ini tampaknya belum diimbangi dengan upaya peningkatan ketahanan masyarakat dari kejahatan narkoba sehingga berbagai upaya keras yang telah dilakukan selama ini sepertinya tidak memberikan sumbangan yang berarti bagi penurunan angka prevalensi narkoba.

GRAFIK 7. 1
TINDAK KEJAHATAN NARKOBA 2000—2008



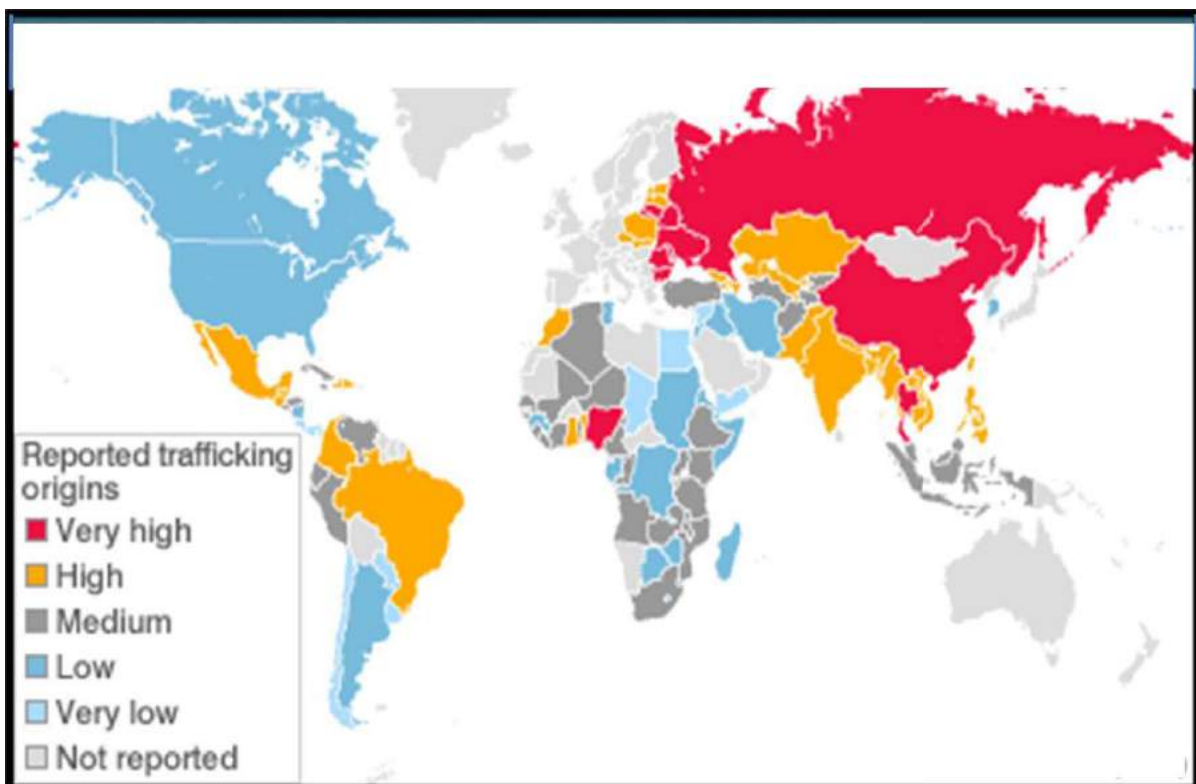
Sumber : Badan Narkotika Nasional

7.1.9 Perdagangan manusia (*human trafficking*)

Peta perdagangan manusia (*human trafficking*) menunjukkan negara-negara di Benua Asia merupakan sumber utama perbudakan modern ini dengan jumlah yang dilaporkan sangat tinggi (skala *high - very high*). Berdasarkan Laporan *United Nation Office on Drugs and Crime* (UNODC) 2006, peringkat kasus perdagangan manusia Indonesia berada pada skala medium, lebih baik dibandingkan dengan China, Thailand, Filipina, India, Vietnam atau Kamboja. Namun, bila dicermati secara absolut, sepanjang tahun 2008 ratusan ribu (lebih kurang 150.000) anak menjadi korban perdagangan manusia. Angka ini cukup mengkhawatirkan karena motif perdagangan tidak hanya melalui tipu daya, tetapi ada kecenderungan melalui penculikan secara langsung dan bahkan secara sadar ada orang tua yang terlibat langsung dan tidak langsung dalam tindak kejahatan ini. Untuk memperkuat landasan hukum bagi upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan perempuan dan anak-anak, kekerasan terhadap pekerja rumah tangga, dan tindak diskriminasi terhadap perempuan, Pemerintah bersama dengan DPR telah menetapkan sejumlah peraturan perundangan seperti

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dan meratifikasi *Convention on the Elimination of All Form of Discrimination Against Women* (CEDAW) dan *Convention on the Rights of Child* (CRC). Bentuk nyata lainnya dalam pencegahan dan penanganan tindak kejahatan ini adalah dibentuknya Unit Pelayanan Perempuan dan Anak di setiap kantor kepolisian, penyusunan rencana aksi nasional, serta melakukan intensifikasi operasi penegakan hukum terhadap kejahatan ini.

Gambar 7.2
Peta Perdagangan Manusia



Sumber : UNODC

7.1.10 Terorisme.

Dalam tatanan ekonomi yang telah terintegrasi secara global, serangan teroris terutama yang berskala besar akan menimbulkan dampak merugikan terhadap kesejahteraan masyarakat di berbagai belahan dunia termasuk negara-negara berkembang. Serangan 11 September 2001 diperkirakan telah menambah jumlah orang miskin sampai dengan 10 juta dan kerugian total terhadap ekonomi dunia mencapai

USD 80 milyar. Kelompok teroris seringkali menjadikan negara yang lemah sebagai tempat perlindungannya dan tumbuh subur seiring kemiskinan, ketidakadilan, dan ketertindasan. Bangsa Indonesia mengalami kerugian baik materi dan non-materi serta kehilangan banyak jiwa sebagai dampak aksi teror di berbagai tempat di wilayah Indonesia. Indonesia juga sering terkena imbas dan warga negara Indonesia terkadang dikaitkan dengan berbagai kejadian terorisme internasional. Untuk menanggapi terorisme, Indonesia juga menjalin kerja sama bilateral, yaitu dengan Polandia dan Vietnam, serta multilateral yaitu melalui forum dialog Asean dan Forum APEC.

7.1.11 Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

Kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat secara umum semakin kondusif dan penanganan berbagai konflik di dalam negeri telah menunjukkan hasil yang menggembirakan. Di NAD, Maluku, dan Poso saat ini telah terwujud rasa keadilan, kepastian hukum, aman, kondusif, dan tercipta harmoni, serta sarana dan prasarana sosial dan ekonomi telah pulih. Sementara kejahatan yang berimplikasi kontijensi semakin dapat diatasi, kejahatan terhadap kekayaan negara terlihat masih belum dapat ditekan secara signifikan. Di berbagai wilayah NKRI masih sering ditemui tindak kejahatan penangkapan ikan liar, pembalakan liar, dan pencurian sumber daya alam lainnya. Dalam tindak kejahatan jenis ini, pihak asing dan pemodal kuat seringkali terlibat sehingga efek kerusakan dan kerugian negara yang ditimbulkan bersifat masif. Selain itu, meningkatnya jumlah masyarakat yang berada di sekitar garis kemiskinan (*transient poverty*) merupakan salah satu faktor penyebab meningkatnya tindak kriminal dengan indikator pencurian, perampokan, pembunuhan, dan pemerkosaan. Berdasarkan data BPS periode Mei 2007 sampai dengan Mei 2008, tindak kejahatan pencurian, perampokan, pembunuhan, dan pemerkosaan spektrumnya tidak hanya di masyarakat perkotaan, tetapi sudah merata dan merambah hampir ke seluruh pelosok pedesaan.

7.1.12 Kinerja Lembaga Kepolisian.

Kemampuan aparat keamanan dalam melakukan penjagaan, pengawalan, dan patroli belum didukung oleh sistem pelaporan kejahatan termasuk sistem emergensi nasional dan penanganan kejahatan yang modern. Akibatnya, banyak laporan kejahatan yang menimpa masyarakat tidak dapat direspon dengan cepat dan tepat, yang berujung pada banyak kasus kejahatan. Dalam rangka mendukung tugas pokok Polri, terutama dalam rangka menurunkan indeks kriminalitas dan tingkat penyelesaian perkara (*crime clearance*) yang masih stagnan pada angka 52 %, pada saat ini di setiap Polda telah terbentuk satuan-satuan khusus yang menangani kejahatan khusus seperti terorisme, narkoba, satuan pengamanan pariwisata di Yogyakarta dan Bali, serta pelayanan khusus terhadap kejahatan perempuan dan anak-anak. Peningkatan kualitas personel diupayakan melalui pendidikan dan pelatihan baik di dalam maupun luar negeri melalui mekanisme pelatihan bersama dan kerja sama operasional dengan sejumlah negara.



Selanjutnya dalam rangka perpolisian masyarakat (Polmas), target pelatihan sebanyak 70.000 petugas Polmas telah tercapai secara keseluruhan pada tahun 2009, yang berarti seluruh desa/kelurahan Indonesia akan terjangkau oleh program ini. Di sisi lain, angka penyimpangan profesi yang mencapai lebih dari 2,5 % dari total jumlah anggota Polri merupakan gambaran profesionalitas anggota Polri yang belum sepenuhnya prima. Terkait dengan penyimpangan profesi aparat keamanan, pemerintah melalui institusi Polri telah melakukan tindakan tegas termasuk pemecatan bagi anggota Polri yang melakukan pelanggaran disiplin, pelanggaran kode etik, dan penyimpangan tugas lainnya tanpa pandang bulu.

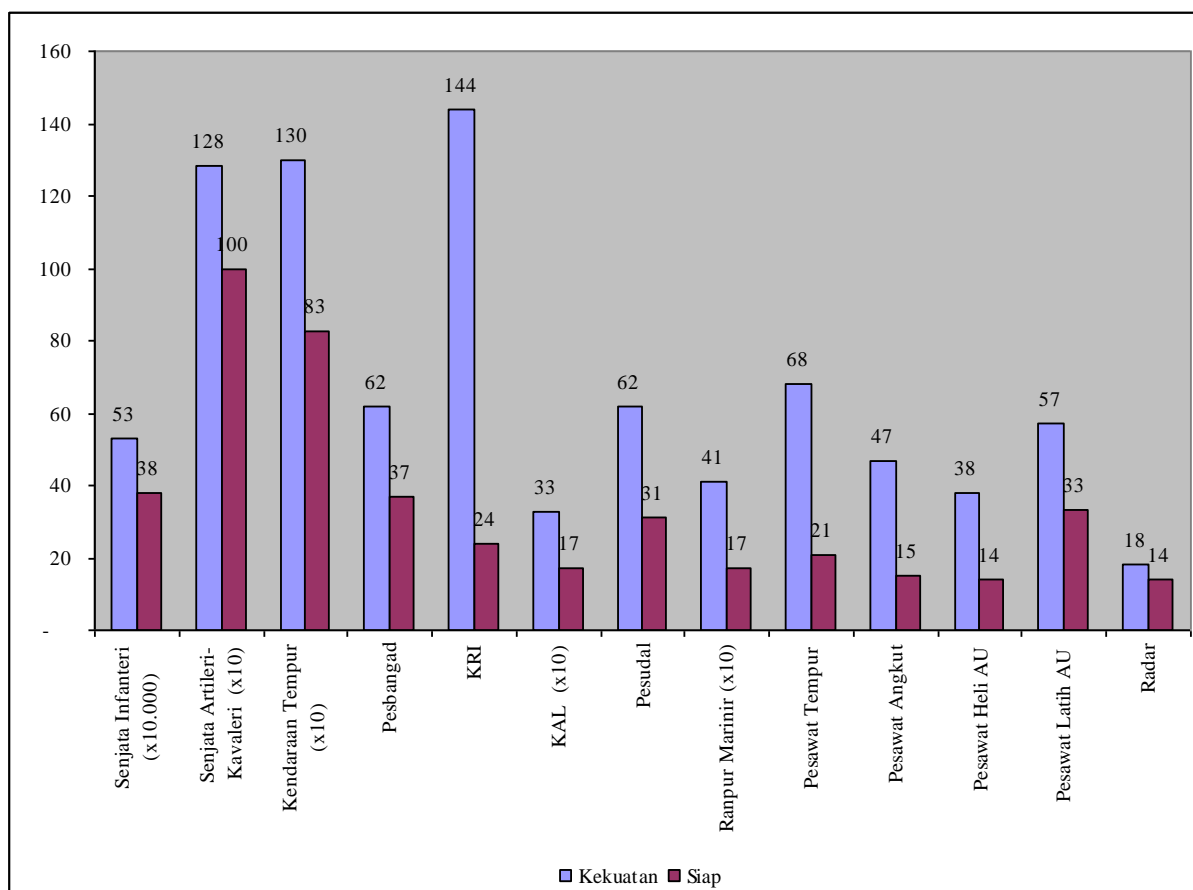
7.1.13 Postur Pertahanan.

Keterbatasan keuangan negara dan skala prioritas pembangunan telah berdampak pada masih rendahnya anggaran pertahanan. Pelaksanaan berbagai program prioritas nasional seperti subsidi BBM, penanggulangan kemiskinan, peningkatan kesehatan masyarakat, dan pemenuhan anggaran pendidikan sebesar 20 % dari APBN sesuai dengan amanat UUD 45 mengakibatkan alokasi anggaran pertahanan tidak beranjak dari 1 % GDP. Pada awal RPJMN 2004–2009 alokasi anggaran pertahanan sebesar 1,1% PDB, tetapi dalam pelaksanaannya justru menunjukkan penurunan. Dalam tiga tahun terakhir belanja pertahanan berturut-turut sebesar 0,92 % PDB tahun 2007; 0,70 % PDB tahun 2008; dan 0,63 % PDB tahun 2009. Kondisi tersebut secara signifikan berpengaruh pada kemampuan pertahanan terutama dihadapkan pada berbagai ancaman dan gangguan kedaulatan NKRI. Di samping akan memperlemah kemampuan alutsista yang ada, rendahnya anggaran pertahanan juga berpengaruh pada kemampuan mengganti alutsista yang habis usia pakai dan kemampuan mengikuti teknologi pertahanan. Sebagian besar alutsista TNI berusia lebih dari 20 tahun dan sebagian darinya memiliki sisa usia pakai antara 7 – 15 tahun.

Secara umum tingkat kesiapan kekuatan matra darat sampai akhir tahun 2008 rata-rata mencapai 68,85 %, yang meliputi: 1.299 unit berbagai jenis kendaraan tempur (ranpur) dengan tingkat kesiapan 63,74 %, 537.178 pucuk senjata Infanteri berbagai jenis dengan tingkat kesiapan 71,94 %, 1.281 pucuk senjata artileri berbagai jenis dengan tingkat kesiapan 77,75 %, 59.842 unit kendaraan bermotor (ranmor) berbagai jenis dengan tingkat kesiapan 87,17 %, 62 unit pesawat terbang berbagai jenis dengan tingkat kesiapan 59,68 %. Tingkat kesiapan kekuatan matra laut rata-rata mencapai 46,27 %, yang meliputi: 144 unit kapal perang (KRI) dengan tingkat kesiapan 16,67 %, 318 unit Kapal Angkatan Laut (KAL) dengan tingkat kesiapan 52,44 %, 412 unit kendaraan tempur marinir berbagai jenis dengan tingkat kesiapan 41,02 %, dan 62 unit pesawat terbang dengan tingkat kesiapan 31 %. Adapun kekuatan alutsista TNI AU yang bertumpu pada pesawat tempur, pesawat angkut, helikopter dan pesawat jenis lainnya, serta peralatan radar dan rudal kesiapan rata-rata saat ini mencapai 78,93 %, yang meliputi: 233 unit pesawat terbang dari berbagai jenis dengan tingkat kesiapan 55,79 %, 18 unit peralatan radar dengan tingkat kesiapan 77,78 %, dan 26 set rudal jarak pendek

dengan tingkat kesiapan 100 %.

GRAFIK 7.2
KEKUATAN DAN KONDISI SIAP ALUTSISTA TNI
TAHUN 2009



Sumber : Kementerian Pertahanan

Meskipun belum memenuhi kebutuhan standar kalori prajurit sebesar 3.600 kalori/prajurit/hari, upaya memenuhi kesejahteraan prajurit melalui pemberian uang lauk pauk (ULP) dalam 4 tahun terakhir terus mengalami peningkatan mulai dari 17.500/hari pada tahun 2005 menjadi Rp. 35.000/hari pada tahun 2008. Di samping itu, kepada prajurit yang bertugas aktif diberikan jaminan pemeliharaan kesehatan, santunan ASABRI, program KPR, pemberian santunan risiko kematian khusus (SRKK), dan pemberian bantuan pendidikan keterampilan bagi personel TNI yang akan memasuki masa pensiun dan keluarga prajurit yang tidak mampu. Langkah ini diperlukan untuk meningkatkan rasa tenteram prajurit ketika bertugas dan harus



meninggalkan keluarga. Selanjutnya, sebagai bentuk penghargaan kepada para veteran, melalui Perpres Nomor 24 Tahun 2008 tentang Dana Kehormatan Veteran RI, para veteran mendapatkan Dana Kehormatan Veteran RI terhitung mulai tanggal 1 Januari 2008.

7.2 Permasalahan dan Sasaran Pembangunan

7.2.1 Permasalahan

A. Kesenjangan Postur dan Struktur Pertahanan Negara.

Postur dan struktur pertahanan negara saat ini tidak sebanding dengan luas dan karakteristik wilayah yurisdiksi nasional, jumlah dan sebaran penduduk, serta ancaman dan gangguan keamanan nasional. Dalam lima tahun mendatang, pertahanan negara diperkirakan akan menghadapi ancaman dan kerawanan yang lebih intens dan lebih tinggi sebagai akibat instabilitas kawasan; perebutan penguasaan dan pemanfaatan secara illegal sumber daya alam dan sumber daya energi; serta peningkatan kapasitas *non-state actor* baik dari sisi sumber daya manusia, teknologi dan permodalan. Peningkatan ancaman dan kerawanan ini, apabila tidak diimbangi dengan pengembangan postur dan struktur pertahanan akan menyebabkan kesenjangan postur dan struktur pertahanan yang lebih memprihatinkan daripada kesenjangan pada saat ini. Kesenjangan postur dan struktur ini merupakan risiko bagi pertahanan negara yang diperkirakan masih akan menghadapi berbagai ancaman seperti *insurgency*, pelanggaran wilayah perbatasan darat, gangguan keamanan di laut dan pelanggaran wilayah yurisdiksi laut, pemanfaatan ruang udara nasional secara ilegal, dan upaya-upaya penguasaan wilayah NKRI oleh negara lain.

Upaya pengembangan postur dan struktur pertahanan sangat terkait dengan kondisi keuangan negara. Dengan kondisi keuangan negara yang terbatas, kekuatan pertahanan yang memungkinkan untuk dibangun dalam lima tahun mendatang adalah *minimum essential force*. Namun demikian, upaya untuk mewujudkan *minimum essential force* dalam lima tahun mendatang dengan berpijak pada postur dan struktur pertahanan saat ini adalah tidak mudah karena jumlah alutsista TNI relatif masih kurang dan dengan tingkat kesiapan alutsista TNI yang belum tinggi, serta sebagian besar alutsista TNI telah mengalami penurunan efek penggentar dan bahkan penurunan daya tembak yang sangat drastis sebagai akibat usia teknis yang tua dan ketertinggalan teknologi.

Selain kekuatan, gelar dan kemampuan pertahanan juga menghadapi tantangan yang tidak ringan. Dengan postur dan struktur pertahanan yang bercirikan *minimum essential force*, mobilitas merupakan faktor yang krusial untuk memastikan kekuatan pertahanan dapat tergelar di setiap jengkal wilayah NKRI. Kemampuan pertahanan yang harus dibangun dalam postur dan struktur pertahanan yang bercirikan *minimum*

essential force juga harus mencakup kemampuan untuk melakukan penyangkalan, penangkalan, pemukul, penggentar, dan rehabilitasi, yang semua ini membutuhkan alutsista yang andal dan modern, serta latihan terutama latihan gabungan secara reguler. Pada akhirnya, tantangan yang harus diatasi dalam rangka pembangunan postur dan struktur pertahanan yang bercirikan *minimum essential force* adalah membentuk prajurit TNI yang profesional dengan tetap mengedepankan perannya sebagai tentara nasional, tentara kejuangan dan tentara kerakyatan. Upaya untuk mengatasi tantangan tersebut adalah tidak mudah karena terkait dengan permasalahan kesejahteraan prajurit yang tidak sepadan dengan risikonya.

B. Wilayah Perbatasan dan Pulau Terdepan (terluar).

Penegasan garis batas Indonesia dengan negara tetangga belum sepenuhnya tuntas. Pada saat ini penegasan garis batas darat Indonesia-Malaysia masih menyisakan 10 daerah bermasalah yaitu: 1) Tanjung Datu; 2) Gunung Raya; 3) Gunung Jagoi/S. Buan; 4) Batu Aum; 5) Titik D 400; 6) P. Sebatik, tugu di sebelah barat P. Sebatik; 7) S. Sinapad; 8) S. Semantipal, 9) Titik C 500 - C 600; dan 10) Titik B 2700 - B 3100. Sedangkan permasalahan garis batas darat antara Indonesia – PNG adalah daerah Wara Smoll yang merupakan wilayah NKRI tetapi telah dihuni, diolah, dan dimanfaatkan secara ekonomis, administrative, serta sosial oleh warga PNG yang sejak dahulu dilayani oleh pemerintah PNG. Selain itu, Indonesia, dan Timor Leste juga belum sepenuhnya sepakat dengan garis batas darat untuk daerah Noel Besi, Manusasi, dan Dilumul/Memo. Permasalahan batas laut Indonesia dengan negara tetangga juga belum sepenuhnya terselesaikan. Berdasarkan *Royal Proclamation* Tanggal 23 Pebruari 1981, secara sepihak Thailand mengumumkan ZEE berjarak 200 NM dari baselines Thailand dan mengusulkan landas kontinen dengan ZEE berhimpit, Namun sesuai dengan UNCLOS 82 Indonesia berpendapat ZEE mempunyai rejim hukum yang berbeda dengan landas kontinen. Sementara itu, Malaysia mengklaim Blok Ambalat di laut Sulawesi dan tidak konsisten dengan UNCLOS 1982 meskipun ZEE belum ditetapkan, sedangkan Indonesia berpendapat Blok Ambalat adalah sah secara hukum milik Indonesia. Kerawanan di wilayah perbatasan juga sangat terkait dengan jumlah pos pertahanan di wilayah perbatasan darat dan di pulau terdepan (terluar) yang masih relatif kurang. Dengan batas darat sepanjang kurang lebih 3.053 km, saat ini baru terbangun 189 pos pertahanan dari total kebutuhan minimal sebanyak 396 pos pertahanan. Selain itu, dari 92 Pulau terdepan (terluar) baru 12 pulau yang memiliki pos pertahanan.

C. Industri Pertahanan.

Industri pertahanan merupakan salah satu pilar penting keamanan nasional terutama pertahanan negara. Kemandirian industri pertahanan nasional akan mengurangi ketergantungan alutsista TNI dan alat utama POLRI, memperkecil resiko



dan kerawanan serta kelangkaan alutsista yang diakibatkan oleh embargo, dan sekaligus dapat meningkatkan efek penggentar pertahanan negara. Secara umum peran industri pertahanan nasional dalam keamanan nasional relatif belum maksimal, yaitu dicerminkan dari potensi Industri pertahanan yang belum sepenuhnya dapat direalisasikan dan dimanfaatkan dalam sistem keamanan nasional. Pengadaan Alutsista TNI dan alat utama POLRI dari luar negeri seyogyanya dihindari jika Alutsista dan peralatan utama tersebut sudah dapat diproduksi oleh industri pertahanan nasional. Pengadaan Alutsista TNI dan alat utama POLRI dari luar negeri sedapat mungkin harus dikaitkan dengan proses alih teknologi, offset dan kerjasama produksi sehingga memperkuat industri pertahanan nasional dan memberikan nilai tambah bagi bangsa Indonesia. Di sisi lain, industri pertahanan nasional yang saat ini identik dengan inefisiensi, kurang kompetitif, dan tidak memiliki keunggulan komperatif, dan tidak mampu memenuhi persyaratan dalam kontrak, juga harus mentransformasi perilaku bisnisnya agar mampu mengemban kepercayaan yang telah diberikan, yang antara lain dicerminkan dari kesesuaian harga dan kualitas produk serta ketepatan waktu penyerahan. Berbagai permasalahan dalam pengembangan industri pertahanan ini sangat terkait dengan ketersediaan dan belum solidnya payung hukum, kelembagaan, dukungan penelitian dan pengembangan, serta dukungan finansial. Untuk itu, penyusunan *road map* industri pertahanan nasional merupakan tantangan yang harus segera di atasi dalam lima tahun mendatang agar peran industri pertahanan nasional semakin signifikan dalam mewujudkan keamanan nasional terutama dalam mendukung pengadaan alutsista TNI dan alat utama Polri.

D. Gangguan Keamanan dan Pelanggaran Hukum di Wilayah Laut Yurisdiksi Nasional.

Luasnya wilayah perairan Indonesia yang dihadapkan pada keterbatasan sarana dan prasarana penjagaan dan pengawasan terutama kapal patroli, *surveillance system*, dan pos-pos pertahanan dan keamanan mengakibatkan masih banyaknya area yang tidak terjangkau operasi pengawasan dan pengamanan. Akibatnya, banyak gangguan keamanan dan pelanggaran hukum di wilayah laut yurisdiksi nasional yang tidak dapat ditangani dan merugikan negara. Kondisi ini juga terkait dengan intensitas operasi yang sangat terbatas baik yang dilakukan secara terpadu maupun secara mandiri oleh lembaga-lembaga yang berwenang di laut. Sebaliknya, ancaman dan gangguan keamanan di wilayah laut yurisdiksi nasional terus berkembang dan diperkirakan akan jauh meningkat di masa depan. Dengan kemampuan permodalan yang sangat kuat, penguasaan teknologi canggih, serta penggunaan kapal yang modern dan berkecepatan tinggi, tindak pelanggaran hukum seperti *penangkapan ikan liar dan pembakalan liar* diperkirakan akan semakin marak dan lebih sulit diatasi.

E. Keamanan dan Keselamatan Pelayaran di Selat Malaka dan ALKI.

Wilayah internasional di Selat Malaka dan tiga jalur ALKI secara umum kondisinya semakin aman, terutama dari tindak kejahatan perompakan yang menimpa kapal-kapal asing. Namun, dunia pelayaran internasional masih menempatkan Selat Malaka dan perairan internasional Indonesia lainnya sebagai wilayah yang relatif berbahaya bagi pelayaran kapal-kapal asing. Selain itu, munculnya Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1816 pada tanggal 2 Juni 2008 yang memberikan kewenangan kepada *cooperating states* untuk melakukan penegakan hukum terhadap perompak di sekitar perairan Somalia, telah memunculkan kekhawatiran bagi negara-negara pantai, dan merupakan tantangan antara Indonesia bersama-sama dengan Singapura dan Malaysia untuk meningkatkan kerja sama trilateral pengamanan Selat Malaka.

F. Terorisme.

Perkembangan aksi terorisme mengindikasikan bahwa sangat mungkin di masa depan aksi terorisme berpotensi menggunakan persenjataan biologi maupun kimia dan bahkan persenjataan nuklir mengingat ketersediaan dan perdagangan teknologi, persenjataan biologi dan kimia, serta bahan nuklir cenderung semakin sulit dikontrol sepenuhnya. Selain itu, aksi terorisme yang melibatkan warga negara Indonesia dengan didukung kekuatan asing juga menunjukkan bahwa terorisme di Indonesia masih merupakan bahaya laten. Di masa mendatang, selain pengungkapan, penegakan hukum dan penuntasan jaringan terorisme, tantangan berat lainnya adalah meyakinkan dan memaksimalkan peran seluruh komponen bangsa dan negara serta masyarakat bahwa terorisme adalah musuh yang harus dihadapi secara bersama-sama dan sekuat tenaga sehingga aksi terorisme di wilayah NKRI dapat tercegah.

G. Kejahatan Lintas Negara dan Kejahatan Serius (*serious crime*).

Seiring dengan perkembangan teknologi, kemudahan transportasi, dan perkembangan ekonomi dunia, kejahatan lintas negara yang juga merupakan kejahatan dengan kategori serius seperti narkoba, perdagangan, dan penyelundupan manusia (*human trafficking*), serta kejahatan terorganisir dan terorisme juga mengalami peningkatan dengan pertumbuhan yang sangat cepat dan sudah mencapai tahap yang mengkhawatirkan. Kejahatan jenis ini memiliki fenomena gunung es. Wilayah Indonesia yang strategis terbukti telah menjadi wilayah tujuan, basis, dan jalur transit kejahatan lintas negara. Kondisi sosial dan ekonomi yang tidak menguntungkan merupakan salah satu faktor bagi anggota masyarakat untuk terlibat dalam kejahatan jenis ini, baik sebagai korban maupun sebagai pelaku kejahatan. Tantangan berat di masa mendatang dalam penanganan kejahatan jenis ini adalah bahwa tindak kejahatan lintas negara ini menghasilkan keuntungan finansial yang sangat besar sehingga jaringan kejahatan jenis ini selalu tumbuh, berkembang, dan menggunakan peralatan yang paling canggih, serta terorganisasi secara sistem sel.



H. Intensitas dan Variasi Kejahatan Konvensional.

Permasalahan sosial ekonomi, terutama kemiskinan merupakan faktor korelatif kriminogen, yang apabila tidak dikelola dengan baik berpotensi meningkatkan tindak kriminalitas. Selanjutnya, perkembangan teknologi terutama teknologi informatika dan komunikasi juga sangat memungkinkan tindak kejahatan konvensional semakin bervariasi. Selain itu, akses informasi dan telekomunikasi yang dapat menjangkau seluruh pelosok negeri seperti televisi, *handphone*, dan internet dapat menginspirasi masyarakat untuk bertindak kriminal layaknya kejahatan perkotaan. Di masa depan arus informasi dan komunikasi dipastikan akan berlangsung lebih cepat lagi dan di sisi lain sebagian masyarakat masih bergelut dengan masalah kemiskinan, pengangguran, dan faktor korelatif kriminogen lainnya, yang kesemua ini akan berdampak pada semakin bervariasinya tindak kejahatan konvensional di seluruh wilayah negeri termasuk perdesaan.

I. Gangguan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat serta Keselamatan Publik.

Kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat yang belum kondusif saat ini sedikit terusik dengan berbagai kejadian yang mengindikasikan bahwa ketertiban masyarakat belum dapat terwujud secara permanen. Berbagai peristiwa gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat kebanyakan masih dilatarbelakangi oleh pemahaman yang sempit terhadap perbedaan suku, agama, dan ras (SARA), perebutan sumber daya alam, kesenjangan ekonomi, dan perebutan pengaruh di dalam setiap proses politik. Di masa mendatang, gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat sangat mungkin akan terjadi lagi dalam bentuk yang lebih merusak dan dalam skala yang lebih besar. Kerumunan massa seperti pertunjukan konser musik dan event olah raga yang seharusnya berlangsung secara aman dan damai, pada kenyataannya justru menimbulkan korban sia-sia sebagai akibat ketidaktertiban yang disebabkan oleh masyarakat itu sendiri. Dalam lima tahun mendatang kegiatan-kegiatan yang melibatkan kerumunan massa dipastikan akan semakin sering terjadi seiring dengan dinamika perkembangan sosial ekonomi. Oleh karena itu, tantangan yang harus diatasi adalah memastikan berbagai kegiatan masyarakat tersebut dapat berlangsung secara aman dan tanpa harus menimbulkan korban yang disertai dengan kehadiran aparat keamanan sebagai pengayom dan pelindung masyarakat.

J. Penanganan dan Penyelesaian Perkara.

Penuntasan perkara kejahatan baik kejahatan konvensional, transnasional, kejahatan terhadap kekayaan negara, maupun kejahatan berimplikasi kontijensi rata-rata masih pada kisaran 52 % setiap tahunnya. Bahkan apabila dilihat tingkat keberhasilannya, proporsi penuntasan kejahatan konvensional relatif paling rendah dibandingkan dengan kejahatan yang lainnya seperti kejahatan transnasional, kejahatan terhadap kekayaan negara, maupun kejahatan berimplikasi kontijensi. Hal ini menunjukkan bahwa langkah penuntasan kejahatan belum secara sepenuhnya menyentuh keselamatan seluruh lapisan masyarakat yang merupakan hak dasar dalam keamanan dan kenyamanan dalam beraktivitas. Di sisi lain, permasalahan yang masih dihadapi institusi adalah proses penyelidikan dan penyidikan yang belum didukung dengan kemampuan sumber daya manusia dan teknologi penyidikan yang memadai. Banyaknya kasus salah tangkap dan kekerasan yang menimpa para tersangka juga telah menimbulkan keprihatinan akan akuntabilitas penuntasan perkara.

K. Kepercayaan Masyarakat terhadap Polisi.

Salah satu keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi kepolisian, terutama dalam hal penanganan tindak kriminalitas, adalah partisipasi masyarakat dalam melaporkan tindak kejahatan yang dialaminya dan sebagai saksi. Tanpa laporan dari masyarakat, polisi tidak dapat melakukan langkah penyelidikan dan penyidikan terhadap suatu kasus kejahatan yang menimpa masyarakat. Seringkali masyarakat - baik sebagai pelapor maupun sebagai saksi tindak kejahatan - merasa tidak nyaman bila berhubungan dengan lembaga kepolisian karena proses yang berbelit-belit, makan waktu yang lama, dan membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Fakta bahwa masih ada anggota Polisi yang melakukan tindakan menyimpang turut menjadikan lembaga kepolisian belum sepenuhnya dapat menjadi andalan masyarakat dalam mengatasi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Masyarakat cenderung main hakim sendiri dan seringkali bertindak anarkhis, yang kesemuanya ini justru lebih memperburuk kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat.

L. Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika.

Upaya pemberantasan peredaran gelap narkoba terus dilakukan secara intensif dan menunjukkan hasil yang signifikan terutama dalam hal kasus pengungkapan laboratorium gelap dan pengungkapan sindikat narkoba baik yang memiliki jaringan nasional maupun internasional. Namun, prevalensi penyalahgunaan narkoba yang justru semakin meningkat, yaitu dari 1,55% menjadi 1,99%, menunjukkan bahwa upaya pencegahan yang dilaksanakan selama ini masih kurang dapat mengimbangi upaya pemberantasan peredaran gelap narkoba. Misi untuk mewujudkan Indonesia bebas narkoba pada tahun 2015 menghadapi tantangan yang cukup berat terutama jika dikaitkan dengan peranan pemangku utama khususnya Pemerintah Daerah dalam



pengecangan penyalahgunaan narkoba. Ketersediaan sarana dan prasarana terapi dan rehabilitasi narkoba yang saat ini jumlahnya masih terbatas dan belum sepenuhnya dapat menjangkau dan melayani korban penyalahgunaan narkoba juga merupakan permasalahan yang harus diatasi dalam lima tahun ke depan.

M. Deteksi dini yang Masih Belum Memadai.

Deteksi dini, yang pada hakikatnya adalah proses pengumpulan data dan informasi, analisis, dan rekomendasi kebijakan dan strategi yang dilaksanakan melalui fungsi intelijen dan kontra-intelijen, merupakan kunci utama dan penentu awal penciptaan keamanan nasional yang meliputi pertahanan (*defense*), keamanan dalam negeri (*Homeland Security*), serta keamanan sosial/insani (*social/human security*). Di seluruh dunia, deteksi dini ini merupakan sumber utama pengambilan keputusan dan kebijakan oleh pimpinan negara (*The Mother of information and policy*). Dengan semakin derasnya arus informasi, kondisi informasi yang asimetrik, dan masifnya potensi ancaman dan gangguan terhadap keamanan nasional, dalam 5 (lima) tahun mendatang, aspek deteksi dini akan semakin dibutuhkan oleh pimpinan negara dan para pengambil keputusan.

O. Keamanan informasi negara yang masih lemah.

Meningkatnya potensi gangguan keamanan dalam negeri, baik karena faktor eksternal luar negeri maupun internal dalam negeri memerlukan peningkatan langkah antisipasi, terutama dari aspek pengamanan rahasia negara dan deteksi dini, agar potensi gangguan keamanan tersebut dapat diredam. Namun, cakupan pengamanan rahasia negara yang baru mencapai 36 % berpotensi terjadinya kebocoran rahasia negara. Masih banyak daerah dan kota strategis belum terjangkau sistem persandian nasional (Sisdina) yang berpotensi mengganggu komunikasi strategis di antara pimpinan pemerintah di pusat dan daerah. Di sisi lain, ketertinggalan teknologi deteksi dini dapat mengganggu kinerja intelijen dalam pengumpulan data gangguan keamanan nasional.

P. Kesenjangan Kapasitas Lembaga Penyusun Kebijakan Pertahanan-Keamanan Negara.

Kemampuan dan peran lembaga-lembaga keamanan nasional dalam merumuskan dan mengintegrasikan kebijakan di bidang keamanan nasional masih harus ditingkatkan. Dalam tingkatan keamanan nasional, munculnya potensi ancaman yang semakin variatif, memerlukan pengelolaan secara lebih terintegrasi, efektif, dan efisien. Pembagian penanganan permasalahan yang belum tuntas dan terbatasnya kerja sama antarinstansi sehingga terkesan bertindak sendiri-sendiri bermuara pada kebutuhan adanya lembaga semacam dewan keamanan nasional yang mampu mengintegrasikan kerangka kebijakan keamanan nasional. Munculnya kebijakan pengintegrasian/penyerasian keamanan nasional

diharapkan dapat meningkatkan kapasitas lembaga-lembaga keamanan nasional baik secara kelembagaan berdasarkan tugas pokok dan fungsi maupun dalam sinerginya dengan lembaga keamanan nasional yang lainnya.

7.2.2 Sasaran Pembangunan

1. Terwujudnya postur dan struktur Pertahanan sebesar 25-27,5% dari kekuatan pokok minimum (*minimum essential force*) yang mampu melaksanakan operasi gabungan dan memiliki efek penggentar. Meningkatnya daya penggentar sistem pertahanan Indonesia akan menurunkan intensitas gangguan kedaulatan dan kewibawaan NKRI. Ketercapaian sasaran ini ditandai dengan meningkatnya profesionalisme personel TNI, meningkatnya kuantitas dan kualitas alutsista TNI, serta terbentuknya komponen bela negara.
2. Terbangunnya 106 pos pertahanan baru di wilayah perbatasan darat menjadi 295 pos pertahanan dari 395 pos pertahanan yang dibutuhkan, serta terbangunnya pos pertahanan baru di 11 pulau terdepan (terluar) dan memantapkan pos pertahanan di 12 pulau terdepan (terluar) beserta penggelaran prajuritnya. Pemantapan dan penambahan pos pertahanan ini diharapkan dapat menurunkan insiden pelanggaran batas wilayah NKRI dan angka gangguan keamanan di wilayah perbatasan seperti kejahatan lintas negara termasuk pembalakan liar, penambangan liar, dan penangkapan ikan liar.
3. Terdayagunakannya industri pertahanan nasional bagi kemandirian pertahanan. Salah satu upaya untuk mewujudkan kekuatan pokok minimum adalah adanya dukungan industri pertahanan nasional. Dukungan ini diperlukan dalam rangka mengurangi ketergantungan alutsista produksi luar negeri. Pencapaian sasaran ini secara optimal akan meningkatkan kemandirian alutsista TNI dan alat utama Polri baik dari sisi kuantitas, kualitas, maupun variasinya.
4. Menurunnya gangguan keamanan laut dan pelanggaran hukum di laut, yaitu perompakan di laut menurun sebesar 70 % dari 30 kasus pada tahun 2008, penangkapan ikan liar menurun sebesar 75% dari 2.120 kasus pada tahun 2008, illegal logging menurun sebesar 85 % dari 1.824 kasus pada tahun 2008, pencemaran di laut menurun sebesar 70% dari 115 kasus pada tahun 2008, penyelundupan manusia dari dan ke Indonesia (langsung) sebesar 70% dari sebanyak 6.421 orang pada tahun 2008, penyelundupan manusia lewat Indonesia (tidak langsung) menurun sebesar 90% dari 1.214 orang pada tahun 2008, dan ketertiban memenuhi persyaratan layar meningkat sebesar 85% dari 8.234 kapal layar yang memenuhi persyaratan pada tahun 2008. Penurunan gangguan keamanan laut dan pelanggaran hukum di laut akan menekan tingkat kerugian negara akibat hilangnya kekayaan negara dan hilangnya potensi penerimaan negara dari aktivitas ilegal di laut. Sasaran ini akan efektif terwujud apabila didukung dengan kualitas dan kuantitas operasi keamanan laut,

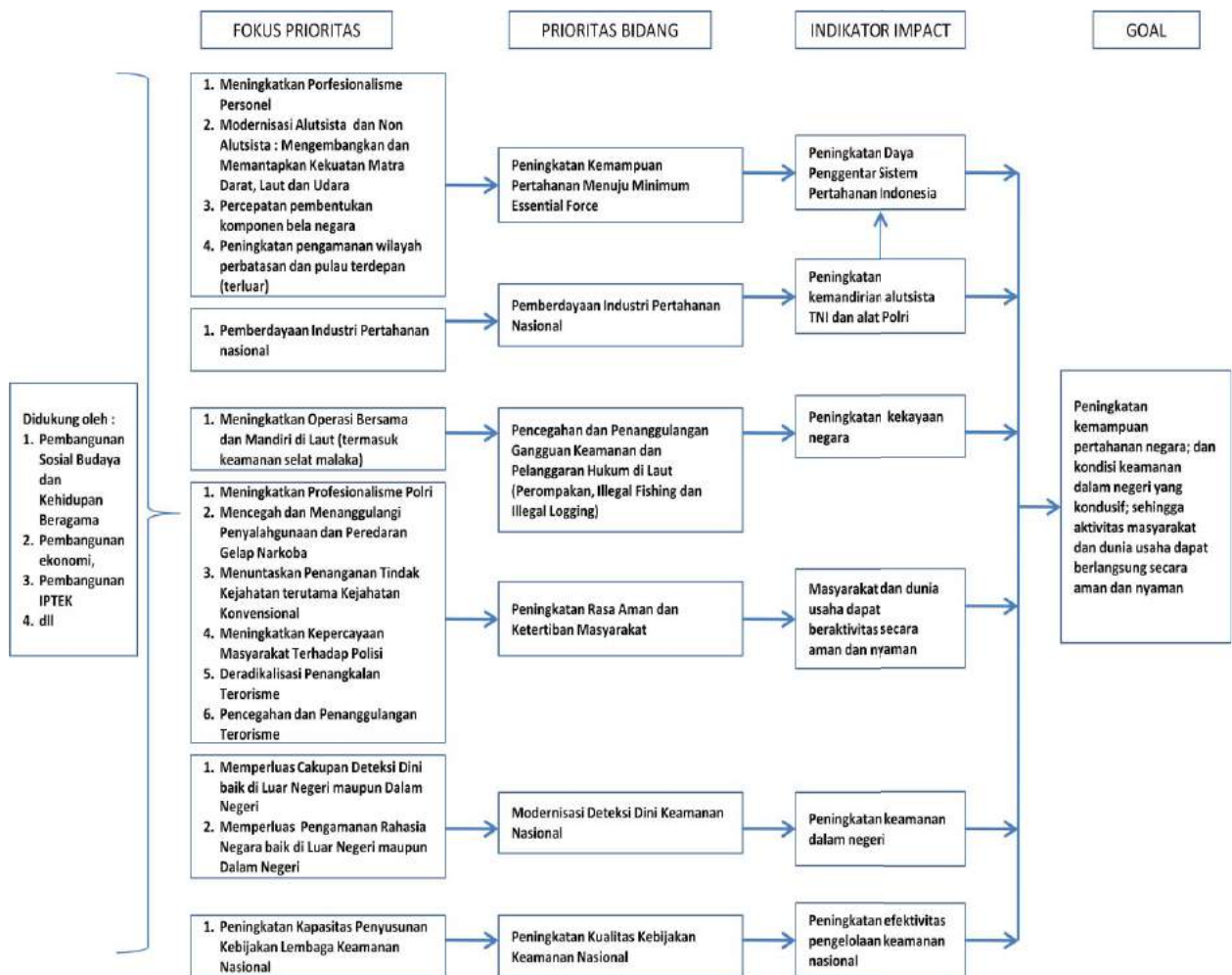


pembangunan stasiun penjaga alur laut kepulauan Indonesia (ALKI), serta penginderaan dan pengawasan (*surveillance*) yang secara fungsional dilakukan oleh Badan Keamanan Laut (Bakamla) yang segera terbentuk sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.

5. Terpantaunya dan terdeteksinya potensi tindak terorisme dan meningkatnya kemampuan dan keterpaduan dalam pencegahan dan penanggulangan tindak terorisme. Tercapainya sasaran ini tercermin dari menurunnya intensitas aksi terorisme, meningkatnya sinergitas di antara lembaga yang berwenang dalam pencegahan dan penanggulangan terorisme, serta meningkatnya kesadaran dan ketangguhan masyarakat akan bahaya terorisme.
6. Menurunnya tingkat kejahatan (*criminal rate*) yang meliputi kejahatan konvensional, transnasional, kontingensi, serta kekerasan terhadap perempuan dan anak menjadi sekitar 105-95 kejadian per 100.000 penduduk. Penurunan tingkat kejahatan ini akan berdampak pada meningkatnya kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat.
7. Meningkatnya persentase penuntasan kejahatan konvensional, transnasional, kontingensi, serta kekerasan terhadap perempuan dan anak menjadi 55 - 60%. Meningkatnya persentase penuntasan kejahatan ini akan meningkatkan kepastian hukum bagi para tersangka.
8. Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga kepolisian yang tercermin pada dari terselenggaranya pelayanan kepolisian sesuai dengan Standar Pelayanan Kamtibmas Prima. Tercapainya sasaran ini berdampak pada masyarakat yaitu ketika berhubungan dengan kepolisian mereka merasa nyaman, terutama ketika melihat dan menghadapi kasus hukum/kriminalitas. Meningkatnya kepercayaan terhadap kepolisian juga ditandai dengan meningkatnya jumlah laporan tindak kriminalitas di masyarakat.
9. Menurunnya angka penyalahgunaan narkoba dan menurunnya peredaran gelap narkoba yang tercermin pada menurunnya angka prevalensi penyalahgunaan narkoba menjadi di bawah 1,5 %. Tercapainya sasaran ini akan membebaskan Indonesia dari narkoba pada tahun 2015, dalam arti seluruh masyarakat sadar dan mengetahui akan bahaya penyalahgunaan narkoba.
10. Terpantaunya dan terdeteksinya ancaman keamanan nasional. Tercapainya sasaran ini akan berdampak pada teranulirnya berbagai potensi ancaman keamanan negeri seperti terorisme, separatisme, kejahatan lintas negara, dan berbagai bentuk kejahatan yang lainnya.
11. Terlindunginya informasi negara. Terlaksananya perlindungan terhadap informasi rahasia negara dari kebocoran akan meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemerintahan. Terwujudnya kedua sasaran ini pada akhirnya akan meningkatkan kondisi keamanan dalam negeri.

12. Meningkatnya kualitas rekomendasi kebijakan nasional di bidang keamanan nasional yang terintegrasi, tepat sasaran, dan tepat waktu. Meningkatnya kualitas rekomendasi kebijakan akan berdampak pada efektivitas keputusan kebijakan nasional dalam menyikapi dinamika ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan.

BAGAN 1.1 KERANGKA PIKIR PEMBANGUNAN BIDANG PERTAHANAN DAN KEAMANAN





7.3 Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan

7.3.1 Arah Kebijakan Pembangunan

Kebijakan pembangunan pertahanan dan keamanan di arahkan pada :

1. modernisasi alutsista serta penggantian alutsista yang umur teknisnya sudah tua dan membahayakan keselamatan prajurit;
2. peningkatan profesionalisme prajurit, yang diiringi dengan peningkatan kesejahteraan prajurit;
3. percepatan pembentukan komponen bela negara;
4. peningkatan kualitas dan kuantitas pos pertahanan dan keamanan di wilayah perbatasan dan pulau terdepan (terluar) beserta penggelaran prajurit TNI dan Polri;
5. pendayagunaan industri pertahanan nasional bagi kemandirian pertahanan, melalui penyusunan cetak biru beserta Road Map, peningkatan Penelitian dan Pengembangan, serta dukungan pendanaannya;
6. intensifikasi dan ekstensifikasi Patroli Keamanan Laut oleh Badan Keamanan Laut (Bakamla), yang didukung oleh efektifitas komando dan pengendalian;
7. pemantapan tata kelola pencegahan dan penanggulangan tindak terorisme serta pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan tindak terorisme;
8. penerapan program “*quick win*” oleh Polri sampai ke tingkat Polres di seluruh wilayah NKRI;
9. peningkatan kapasitas SDM dan modernisasi teknologi kepolisian sebagai bagian penerapan reformasi Kepolisian Negara Republik Indonesia;
10. peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga kepolisian;
11. ekstensifikasi dan intensifikasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, penyediaan fasilitas terapi dan rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan Narkoba yang terjangkau seluruh lapisan masyarakat, dan pemberantasan jaringan narkoba;
12. peningkatan kompetensi SDM intelijen yang didukung dengan modernisasi teknologi intelijen dan koordinasi intelijen yang kuat;
13. pemantapan Sistem Persandian Nasional (Sisdina) dan perluasan cakupan Sisdina terutama untuk wilayah NKRI dan perwakilan RI di negara-negara tertentu;
14. peningkatkan kapasitas dan keserasian lembaga penyusun kebijakan pertahanan keamanan negara.

7.3.2 Strategi Pembangunan

1. Membangun kekuatan dan kemampuan pertahanan secara terintegrasi menuju postur dan struktur pertahanan kekuatan pokok minimum. Dalam strategi ini, kekuatan dan kemampuan matra darat, laut, serta udara terus dimantapkan dan dikembangkan secara optimal. Pemantapan dan pengembangan matra ini dilakukan dalam kerangka Tri Tunggal Matra yang mampu melaksanakan operasi gabungan dan memiliki kekuatan dan kemampuan serbu (*striking force*) sebagai fondasi untuk membangun efek penggentar, termasuk di wilayah perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar.
2. Memantapkan gelar pasukan TNI di wilayah perbatasan, pulau terdepan dan wilayah penyangga dengan didukung pembangunan sarana dan prasarana pertahanan seperti penambahan pos pertahanan untuk memperpendek jarak antarpos dan pembangunan jalan inspeksi sepanjang garis perbatasan. Strategi ini merupakan bagian dari strategi raya pembangunan kawasan perbatasan dengan pendekatan kesejahteraan dan tetap mengutamakan dimensi keamanan
3. Mendayagunakan industri pertahanan nasional dalam rangka meningkatkan kemandirian pertahanan. Strategi ini pada dasarnya memaksimalkan penggunaan alutsista produksi nasional dan secara simultan industri pertahanan nasional didorong untuk senantiasa memperbaiki kualitas alutsista yang diproduksi. Dengan semakin besarnya skala ekonomi industri pertahanan nasional harga alutsista produksi industri nasional dimungkinkan dapat bersaing di pasar.
4. Memadukan seluruh komponen dan kekuatan yang berwenang dalam penanganan gangguan keamanan dan penegakan hukum di laut dengan koordinasi yang kuat sehingga pengawasan, penindakan secara cepat, dan penegakan hukum di laut dapat berjalan secara efektif dan efisien. Sinergitas kewenangan ini akan diperkuat dengan beroperasinya Badan Keamanan Laut yang lebih diakui dalam dunia pelayaran internasional.
5. Menyempurnakan tata kelola pencegahan dan penanggulangan tindak terorisme. Dalam strategi ini, peran masyarakat dalam pencegahan terorisme akan semakin diberdayakan.
6. Menurunkan kejadian kriminal (*criminal index*) dan meningkatkan penuntasan kejahatan (*clearance rate*). Dalam rangka meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga kepolisian, peningkatan kinerja dan transparansi lembaga kepolisian, serta perbaikan tata kelola "*complain resolution*" dari masyarakat menjadi penjuru dalam strategi ini.



7. Mendorong masyarakat menjadi imun narkoba, membantu korban penyalahgunaan agar pulih kembali, dan memberantas jaringan pengedar narkoba. Startegi ini utamanya akan menggunakan pendekatan yang bersifat pemberdayaan lingkungan kerja, keluarga, dan pendidikan.
8. Meningkatkan kapasitas dan kemampuan dalam pemantauan dan deteksi dini melalui modernisasi teknologi intelijen dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia. Koordinasi di antara berbagai lembaga yang memiliki tugas pokok dan fungsi dalam deteksi dini juga semakin diperkuat.
9. Meningkatkan perlindungan informasi dan rahasia negara melalui peningkatan tata kelola pengumpulan, penyimpanan, serta transmisi dan penerimaan informasi negara dalam suatu sistem tertentu yang efektif dan efisien.
10. Meningkatkan keterpaduan dan kapasitas lembaga penyusun kebijakan di bidang keamanan nasional sehingga mampu merumuskan rekomendasi yang *operable*, tepat sasaran, dan tepat waktu kepada pimpinan negara.
11. Meningkatkan kepedulian dan pemihakan seluruh komponen bangsa dan negara terhadap ketercukupan anggaran pertahanan dan keamanan. Selama ini paradigma anggaran pertahanan dan keamanan yang selalu didikotomikan dengan anggaran untuk kesejahteraan rakyat (*guns versus butter*) ternyata telah ditinggalkan oleh hampir seluruh negara karena pada kenyataannya justru anggaran pertahanan dan keamanan adalah bersifat Investasi. Dalam paradigma baru ini, ketercukupan anggaran pertahanan dan keamanan merupakan sumber daya yang paling vital untuk mewujudkan keamanan nasional yang pada gilirannya akan mendukung dan mendorong upaya peningkatan kesejahteraan (*guns create butter*).

RENCANA TINDAK PRORITAS BIDANG PERTAHANAN DAN KEAMANAN

BIDANG PEMBANGUNAN : PERTAHANAN DAN KEAMANAN

PRIORITAS BIDANG I : Peningkatan Kemampuan Pertahanan Menuju Minimum Essential Forces

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIA N/LEMBAGA TERKAIT	TOTAL FOKUS PRIORITAS (2010-2014) (Rp. Milyar)
				2010	2014			
I	Fokus Prioritas 1 : Meningkatkan Profesionalisme Personel							12.319,8
a.	Penyelenggaraan administrasi dan perawatan personel integratif	Melaksanakan pemenuhan hak-hak prajurit dan PNS TNI berupa pembayaran gaji, honorarium dan tunjangan serta lembur yang dapat diterima secara tepat waktu dan tepat jumlah sesuai dengan peraturan yang berlaku	Persentase pemenuhan hak-hak prajurit dan PNS TNI berupa pembayaran gaji, honorarium, dan tunjangan serta lembur yang dapat diterima secara tepat waktu dan tepat jumlah sesuai dengan peraturan yang berlaku	100%	100%	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Integratif	MABES TNI	3.599,7
b.	Latihan kesiapsiagaan Ops	Menguji kemampuan unsur-unsur TNI dan diarahkan untuk menyiapkan unsur TNI dalam rangka tugas OMP dan OMSP	Persentase kecukupan porsi dan jenis latihan kesiapsiagaan.	20%	22%	Program Profesionalisme Prajurit Integratif	MABES TNI	47,9

BIDANG PEMBANGUNAN : PERTAHANAN DAN KEAMANAN

PRIORITAS BIDANG I : Peningkatan Kemampuan Pertahanan Menuju Minimum Essential Forces

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIA N/LEMBAGA TERKAIT	TOTAL FOKUS PRIORITAS (2010-2014) (Rp. Milyar)
				2010	2014			
c.	Latihan Pembinaan Balakpus TNI	Memelihara serta meningkatkan kemampuan dan kesiapsiagaan satuan untuk mendukung tugas pokok satuan	Persentase kecukupan porsi dan jenis latihan Balakpus	20%	22%	Program Profesionalisme Prajurit Integratif	MABES TNI	37,2
d.	Latihan Pratugas Operasi	Meningkatkan dan menguji kemampuan unsur TNI yang akan melaksanakan tugas ke daerah rawan dan perbatasan dalam bentuk latihan Pratugas Operasi.	Persentase kecukupan porsi dan jenis latihan pratugas	20%	22%	Program Profesionalisme Prajurit Integratif	MABES TNI	7,8
e.	Pembangunan Sarana Prasarana Profesionalisme Personel Integratif	Tercukupinya fasilitas profesionalisme personel secara minimum	Persentase jumlah kecukupan fasilitas pendidikan kesehatan perumahan sarana prajurit	15%	17%	Program Profesionalisme Prajurit Integratif	MABES TNI	265,8
f.	Latihan Matra Darat	Terwujudnya profesionalisme personel dan satuan dalam rangka pencapaian sasaran pembinaan kekuatan dan kemampuan TNI AD menuju MEF	Persentase ketepatan frekuensi latihan perorangan dan satuan secara rutin dan terjadwal	25%	30%	Program Peningkatan Profesionalisme Personel Matra Darat	TNI AD	681,9

BIDANG PEMBANGUNAN : PERTAHANAN DAN KEAMANAN

PRIORITAS BIDANG I : Peningkatan Kemampuan Pertahanan Menuju Minimum Essential Forces

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIA N/LEMBAGA TERKAIT	TOTAL FOKUS PRIORITAS (2010-2014) (Rp. Milyar)
				2010	2014			
g.	Pembangunan Sarana-Prasarana Profesionalisme Personel Matra Darat	Tercukupinya fasilitas profesionalisme personel secara minimum	Persentase jumlah kecukupan fasilitas pendidikan-kesehatan-perumahan-asrama prajurit	10%	15%	Program Peningkatan Profesionalisme Personel Matra Darat	TNI AD	389,6
h.	Penyelenggaraan Latihan Operasi Matra Laut	Peningkatan kemampuan personel dan satuan TNI AL dalam melaksanakan tugas operasi TNI AL	Persentase kesiapan dan keberhasilan operasi TNI AL secara mandiri, gabungan dan bersama secara akuntabel dan tepat waktu	70%	75%	Program Peningkatan Profesionalisme Personel Matra Laut	TNI AL	345,5
i.	Pembangunan Fasilitas dan sarana prasarana profesionalisme Matra Laut	Tercukupinya fasilitas dan sarana prasarana profesionalisme Matra Laut	Persentase kesiapan fasilitas dan sarana prasarana profesionalisme matra laut secara akuntabel dan tepat waktu	40%	45%	Program Peningkatan Profesionalisme Personel Matra Laut	TNI AL	318,9
j.	Latihan Matra Udara	Terlaksananya kegiatan latihan operasi Matra Udara	Persentase kualitas dan kuantitas latihan tingkat L.U.M.P-1 s.d. L.U.M.P-4 Matra Udara	30%	35%	Peningkatan Profesionalisme Personel Matra Udara	TNI AU	232,2
k.	Pembangunan Sarana-Prasarana Kesejahteraan Personel Matra Udara	Tercukupinya fasilitas kesejahteraan personel secara minimum	Persentase jumlah kecukupan fasilitas perumahan-asrama prajurit	20%	25%	Peningkatan Profesionalisme Personel Matra Udara	TNI AU	261,3

BIDANG PEMBANGUNAN : PERTAHANAN DAN KEAMANAN

PRIORITAS BIDANG I : Peningkatan Kemampuan Pertahanan Menuju Minimum Essential Forces

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIA N/LEMBAGA TERKAIT	TOTAL FOKUS PRIORITAS (2010-2014) (Rp. Milyar)
				2010	2014			
1.	Operasi Militer untuk Perang (OMP).	Terlaksananya tugas OMP secara efektif	Jumlah dan cakupan wilayah penyelenggaraan OMP	90%	92%	Program Penggunaan Kekuatan Pertahanan Integratif	MABES TNI	6.132,0
II	Fokus Prioritas 2 : Modernisasi Alutsista dan Non Alutsista : Mengembangkan dan Memantapkan Kekuatan Matra Darat, Laut dan Udara							78.278,5
a.	Pengadaan MKK	Peningkatan kemampuan dan penambahan jumlah munisi	Persentase kecukupan Bekal Pokok MKK	36%	38%	Program Modernisasi Alutsista/Non Alutsista/Sarpras Integratif	MABES TNI	194,0
b.	Pengadaan Munisi Khusus	Peningkatan kemampuan dan penambahan jumlah munisi khusus	Persentase kecukupan Munisi Khusus	36%	38%	Program Modernisasi Alutsista/Non Alutsista/Sarpras Integratif	MABES TNI	356,3
c.	Pengadaan MKB	Peningkatan kemampuan dan penambahan jumlah MKB	Persentase kecukupan Bekal Pokok MKB	63%	65%	Program Modernisasi Alutsista/Non Alutsista/Sarpras Integratif	MABES TNI	679,8
d.	Pengadaan Alutsista Strategis Integratif	Percepatan peningkatan kemampuan Alutsista Integratif	Persentase pencapaian MEF Integratif	10%	14%	Program Modernisasi Alutsista/Non Alutsista/Sarpras Integratif	MABES TNI	5.872,6

BIDANG PEMBANGUNAN : PERTAHANAN DAN KEAMANAN

PRIORITAS BIDANG I : Peningkatan Kemampuan Pertahanan Menuju Minimum Essential Forces

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIA N/LEMBAGA TERKAIT	TOTAL FOKUS PRIORITAS (2010-2014) (Rp. Milyar)
				2010	2014			
e.	Pengadaan / Penggantian Kendaraan Tempur	Terlaksananya modernisasi dan peningkatan Alutsista Ranpur dalam rangka pencapaian sasaran pembinaan kekuatan serta kemampuan TNI Angkatan Darat menuju MEF	Persentase peningkatan dan penambahan Ranpur terhadap MEF	20%	25%	Program Modernisasi Alutsista dan Non Alutsista/Sarana dan Prasarana Matra Darat	TNI AD	491,1
f.	Pengadaan / Penggantian Pesawat Terbang (Sabang)	Terlaksananya modernisasi dan peningkatan Alutsista Pesud/Rotary Wing dalam rangka pencapaian sasaran pembinaan kekuatan serta kemampuan TNI Angkatan Darat menuju MEF	Persentase peningkatan dan penambahan Sabang terhadap MEF	20%	25%	Program Modernisasi Alutsista dan Non Alutsista/Sarana dan Prasarana Matra Darat	TNI AD	217,2
g.	Pengadaan / Penggantian Senjata dan Munisi	Terlaksananya modernisasi dan peningkatan Senjata Berat dan Senjata Ringan dalam rangka pencapaian sasaran pembinaan kekuatan serta kemampuan TNI Angkatan Darat menuju MEF	Persentase peningkatan dan penambahan Senjata dan munisi terhadap MEF	20%	25%	Program Modernisasi Alutsista dan Non Alutsista/Sarana dan Prasarana Matra Darat	TNI AD	567,6

BIDANG PEMBANGUNAN : PERTAHANAN DAN KEAMANAN

PRIORITAS BIDANG I : Peningkatan Kemampuan Pertahanan Menuju Minimum Essential Forces

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIA N/LEMBAGA TERKAIT	TOTAL FOKUS PRIORITAS (2010-2014) (Rp. Milyar)
				2010	2014			
h.	Pengadaan Alutsista Strategis Matra Darat	Percepatan Modernisasi Alutsista melalui PLN	Persentase pencapaian MEF matra Darat	15%	23%	Program Modernisasi Alutsista dan Non Alutsista/Sarana dan Prasarana Matra Darat	TNI AD	16.357,0
i.	Peningkatan / pengadaan Alpung, KRI, KAL, Ranpur dan Rantis	Peningkatan kemampuan dan penambahan jumlah Alpung, KRI, KAL, Ranpur dan Rantis	Persentase kesiapan dan penambahan Alpung, KRI, KAL, Ranpur dan Rantis secara akuntabel dan tepat waktu	40%	45%	Program Modernisasi Alutsista dan non Alutsista serta Pengembangan Fasilitas dan Sarana Prasarana Pertahanan Negara Matra Laut	TNI AL	657,3
j.	Peningkatan/Pengadaan Pesud dan Sarana Prasarana Penerbangan TNI AL.	Peningkatan kesiapan dan penambahan Pesud beserta sarana prasarana Penerbangan TNI AL	Persentase kesiapan dan penambahan Pesawat Udara TNI AL beserta sarana prasarana Penerbangan TNI AL dalam mendukung tugas operasi secara akuntabel dan tepat waktu	40%	45%	Program Modernisasi Alutsista dan non Alutsista serta Pengembangan Fasilitas dan Sarana Pra sarana Pertahanan Negara Matra Laut	TNI AL	159,7

BIDANG PEMBANGUNAN : PERTAHANAN DAN KEAMANAN

PRIORITAS BIDANG I : Peningkatan Kemampuan Pertahanan Menuju Minimum Essential Forces

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIA N/LEMBAGA TERKAIT	TOTAL FOKUS PRIORITAS (2010-2014) (Rp. Milyar)
				2010	2014			
k.	Pengadaan Alutsista Strategis Matra Laut	Percepatan pengadaan Alutsista Strategis Matra Laut	Persentase penambahan material Alutsista strategis TNI AL secara akuntabel dan tepat waktu	14%	22%	Program Modernisasi Alutsista dan non Alutsista serta Pengembangan Fasilitas dan Sarana Pra sarana Pertahanan Negara Matra Laut	TNI AL	20.315,9
l.	Peningkatan/Pengadaan Pesawat Udara	Peningkatan kemampuan dan penambahan jumlah pesawat udara	Persentase peningkatan kemampuan dan penambahan jumlah Pesawat udara terhadap MEF	15%	46%	Modernisasi Alutsista dan non Alutsista serta Pengembangan Fasilitas dan Sarpras Matra Udara	TNI AU	7.796,9
m.	Peningkatan/Pengadaan Radar dan Alat Komlek Lainnya	Peningkatan kemampuan dan penambahan jumlah Radar dan Alat Komlek Lainnya	Persentase peningkatan kemampuan dan penambahan jumlah Radar dan Alat Komlek Lainnya terhadap MEF	10%	40%	Modernisasi Alutsista dan non Alutsista serta Pengembangan Fasilitas dan Sarpras Matra Udara	TNI AU	4.616,8
n.	Pengadaan Alutsista Strategis	Percepatan peningkatan alutsista strategis matra udara	Persentase peningkatan total Alutista Strategis Matra Udara terhadap MEF	10%	32%	Modernisasi Alutsista dan non Alutsista serta Pengembangan Fasilitas dan Sarpras Matra Udara	TNI AU	19.996,4

BIDANG PEMBANGUNAN : PERTAHANAN DAN KEAMANAN

PRIORITAS BIDANG I : Peningkatan Kemampuan Pertahanan Menuju Minimum Essential Forces

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIA N/LEMBAGA TERKAIT	TOTAL FOKUS PRIORITAS (2010-2014) (Rp. Milyar)
				2010	2014			
III	Fokus Prioritas 3 : Percepatan pembentukan komponen Bela Negara							57,4
a.	Pembinaan Kesadaran Bela Negara	Terlaksananya penerapan nilai-nilai bela negara pada masyarakat	Indeks penerapan nilai-nilai bela negara pada masyarakat	25%	25%	Program Potensi Pertahanan	KEMENHAN	19,7
b.	Pembentukan dan Pembinaan Komponen Cadangan	Terbentuknya komponen cadangan sesuai postur pertahanan secara akuntabel	Persentase terbentuknya komponen cadangan sesuai postur pertahanan secara akuntabel	20%	20%	Program Potensi Pertahanan	KEMENHAN	17,6
c.	Penataan dan Pembinaan Komponen Pendukung	Tertata dan terbinanya komponen pendukung secara terintegrasi dengan data yang up-to-date, akurat dan siap digunakan	Persentase penataan komponen pendukung secara terintegrasi dengan data yang up-to-date, akurat dan siap digunakan	20%	20%	Program Potensi Pertahanan	KEMENHAN	20,1
IV	Fokus Prioritas 4 : Peningkatan Pengamanan Wilayah Perbatasan dan pulau terdepan (terluar)							268,1
a.	Penyelenggaraan Surta Hidros	Peningkatan penyelenggaraan Surta Hidros Matra Laut	Persentase kesiapan dan kelengkapan data dan informasi Hidro-oseanografi secara akuntabel dan tepat waktu	40%	54%	Program Dukungan Kesiapan Matra Laut	TNI AL	26,5

BIDANG PEMBANGUNAN : PERTAHANAN DAN KEAMANAN

PRIORITAS BIDANG I : Peningkatan Kemampuan Pertahanan Menuju Minimum Essential Forces

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIA N/LEMBAGA TERKAIT	TOTAL FOKUS PRIORITAS (2010-2014) (Rp. Milyar)
				2010	2014			
b.	Penyelenggaraan Operasi Matra Laut dan Penegakan Hukum serta Penjagaan Keamanan di wilayah Laut Yuridiksi Nasional	Peningkatan penegakan hukum dan penjagaan keamanan di wilayah laut yuridiksi nasional serta kesiapsiagaan operasi TNI AL	Persentase wilayah laut yuridiksi nasional yang bebas pelanggaran hukum dan gangguan keamanan serta kesiapsiagaan operasi TNI AL secara akuntabel dan tepat waktu	48%	65%	Program Dukungan Kesiapan Matra Laut	TNI AL	200,8
c.	Penyelenggaraan Surta	Peningkatan penyelenggaraan Surta	Persentase kualitas dan kuantitas produk Surta untuk kepentingan militer	30%	35%	Dukungan Kesiapan Matra Udara	TNI AU	12,5
d.	Pembangunan sarana dan prasarana pertahanan di wilayah perbatasan	Meningkatnya jumlah sarana dan prasarana pertahanan di wilayah perbatasan	Persentase kecukupan sarana dan prasarana kebijakan pertahanan di wilayah perbatasan	10%	14%	Program Manajemen pembangunan sarana prasarana pertahanan	KEMENHAN	12,9
e.	Pengadaaan Materiil dan Sarana Prasarana Perbatasan	Mendukung pelayanan keamanan di daerah perbatasan	Jumlah materiil pos Polri di daerah perbatasan dan pulau terluar (pos)	20	100 ^{K)}	Peningkatan Sarana Prasarana Polri	POLRI	15,5
TOTAL								90.923,8

Keterangan :

^{K)} Angka kumulatif 5 tahun (2010-2014)

BIDANG PEMBANGUNAN : PERTAHANAN DAN KEAMANAN
PRIORITAS BIDANG 2 : PEMBERDAYAAN INDUSTRI PERTAHANAN NASIONAL

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIA N/LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI PRIORITAS 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
I	Fokus Prioritas 1 : PEMBERDAYAAN INDUSTRI PERTAHANAN NASIONAL							8.174,0
a.	Penyusunan Rencana Induk, <i>Master Plan</i> dan <i>Road Map</i> Revitalisasi Industri Pertahanan	Tersusunnya rencana pengembangan & pengadaan alutsista TNI dan Alut Polri 2010 - 2014	Dokumen rencana pengembangan dan pengadaan	50%	100% ^{K)}	Program Pengembangan Teknologi dan Industri Pertahanan	KEMENHAN	-
b.	Konsolidasi RPJMN 2010-2014 beserta RKP. Penguatan basis pendanaan, dan Perumusan Kerangka Pendanaan 5 tahun	Tersusunnya mekanisme pendanaan Industri Pertahanan dalam negeri yang bersifat <i>multiyears</i>	Rumusan pendanaan Industri Pertahanan Dalam Negeri yang bersifat <i>multiyears</i>	100%	100%	Program Pengembangan Teknologi dan Industri Pertahanan	KEMENHAN	-
c.	Revisi Keppres 80 Tahun 2003 untuk mendukung revitalisasi industri pertahanan	Tersedianya payung hukum untuk mendukung revitalisasi industri pertahanan	Ditetapkannya Keppres Pengadaan barang dan jasa	100%	100%	Program Pengembangan Teknologi dan Industri Pertahanan	KEMENHAN	-

BIDANG PEMBANGUNAN : PERTAHANAN DAN KEAMANAN
PRIORITAS BIDANG 2 : PEMBERDAYAAN INDUSTRI PERTAHANAN NASIONAL

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIA N/LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI PRIORITAS 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
d.	Identifikasi teknologi Alutsista TNI dan Alut POLRI yang dibutuhkan dalam PJP I	Tersedianya data kemampuan produksi alutsista TNI dan Alut Polri oleh Industri Pertahanan dalam Negeri	Jumlah item produk alutsista TNI dan Alut Polri yang mampu diproduksi oleh Industri Pertahanan dalam Negeri	25%	100% ^{K)}	Program Pengembangan Teknologi dan Industri Pertahanan	KEMENHAN	-
e.	Pembentukan Komite Kebijakan Industri Pertahanan sebagai <i>Clearing House</i>	Tersedianya badan <i>Clearing House</i> lintas bidang dan lintas KL	Efisiensi dan Efektivitas pengadaan Alutsista TNI dan Alut POLRI	100%	100%	Program Pengembangan Teknologi dan Industri Pertahanan	KEMENHAN	-
f.	Refocusing, intensifikasi dan kolaborasi R & D	Terwujudnya model dan/atau <i>prototype</i> alat peralatan pertahanan matra darat, laut, dan udara yang sesuai dengan kemajuan IPTEK dan mampu dikembangkan secara mandiri	Jumlah model dan /atau <i>prototype</i> alat peralatan pertahanan matra darat, laut, dan udara yang sesuai dengan kemajuan IPTEK dan mampu dikembangkan secara mandiri	30%	30%	Program Pengembangan Teknologi dan Industri Pertahanan	KEMENHAN	--
g.	Penelitian dan Pengembangan Alat Peralatan Pertahanan	Terwujudnya model dan/atau <i>prototype</i> alat peralatan pertahanan matra darat, matra laut dan matra udara yang sesuai kemajuan IPTEK dan mampu dikembangkan secara mandiri	Persentase prototipe yang mampu dikembangkan secara mandiri	30%	30%	Program Penelitian dan Pengembangan KEMENHAN	KEMENHAN	19,3
h.	Produksi Alutsista industri dalam negeri	Meningkatnya produksi Alutsista industri dalam negeri	Jumlah produksi Alutsista industri dalam negeri	20%	25%	Program Pengembangan Teknologi dan Industri Pertahanan	KEMENHAN	7.100,0
i.	Pengkajian dan pengembangan peralatan sandi	Tersedianya kajian pengembangan peralatan sandi	Jumlah hasil pengkajian dan pengembangan peralatan sandi	3 paket	13 paket ^{K)}	Program Pengembangan Persandian Nasional	LEMBAGA SANDI NEGARA	34,7

BIDANG PEMBANGUNAN : PERTAHANAN DAN KEAMANAN
PRIORITAS BIDANG 2 : Pemberdayaan Industri Pertahanan Nasional

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIA N/LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI PRIORITAS 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
j.	Pengembangan Alut Kepolisian produksi dalam negeri	Meningkatkan kemandirian alut Polri produksi dalam negeri	Persentase potensi industri dalam negeri yang termanfaatkan	20%	25%	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana POLRI	POLRI	1.000,0
k.	Pembuatan Prototype	Meningkatkan Kemandirian Polri dalam memberikan yanmas	Jumlah <i>Prototype</i> yang dihasilkan (Prototipe)	5	22 ^{k)}	Penelitian dan Pengembangan Teknologi Kepolisian	POLRI	20,0
TOTAL								8.174,0

Keterangan :

^{k)} Angka kumulatif 5 tahun (2010-2014)

BIDANG PEMBANGUNAN : PERTAHANAN DAN KEAMANAN

PRIORITAS BIDANG 3 : Pencegahan dan Penanggulangan Gangguan Keamanan dan Pelanggaran Hukum di Laut (Perompakan, Illegal Fishing, dan Illegal Logging)

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIA N/LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI PRIORITAS 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
I	Fokus Prioritas 1 : Meningkatkan Operasi Bersama dan Mandiri di Laut (termasuk keamanan Selat Malaka)							879,5
a.	Peningkatan Koordinasi Pengawasan Keamanan laut	Meningkatnya efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pengawasan keamanan laut	Penyelesaian sistem <i>early warning</i> dan <i>sea surveillince</i> termasuk integrasinya	15%	100%	Peningkatan Koordinasi Keamanan dan Keselamatan di Laut	BAKORKAMLA	570,3
b.	Penyelenggaraan OMSP Matra Udara	Peningkatan penyelenggaraan operasi militer selain perang Matra Udara dan penegakan hukum serta penjagaan keamanan di wilayah yuridiksi nasional	Jumlah dan cakupan wilayah penyelenggaraan OMSP Matra Udara	30%	35%	Dukungan Kesiapan Matra Udara	TNI AU	5,6
c.	Pembinaan Kepolisian Perairan	Meningkatkan keamanan perairan pantai dan sungai; Terpeliharanya peralatan dan pendukungnya hingga siap pakai	Persentase gangguan keamanan yang menurun pada jalur aktivitas masyarakat yang menggunakan moda transportasi laut	10%	11%	Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban masyarakat	POLRI	71,7
d.	Peningkatan Operasi Bersama Keamanan Laut	Pelaksanaan operasi bersama di laut	Menurunnya angka pelanggaran hukum di laut (paket)	3	23 ^{K)}	Peningkatan Koordinasi Keamanan dan Keselamatan di Laut	BAKORKAMLA	232,0
TOTAL								879,5

Keterangan :

^{K)} Angka kumulatif 5 tahun (2010-2014)

**BIDANG PEMBANGUNAN
PRIORITAS BIDANG 4**

**: PERTAHANAN DAN KEAMANAN
: Peningkatan Rasa Aman dan Ketertiban Masyarakat**

NO	FOKUS PRIORITAS / KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/L EMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI PRIORITAS 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
I	Fokus Prioritas 1 : Meningkatkan Profesionalisme Polri							123.689,0
a.	Penyelenggaraan Administrasi Perawatan Personel Polri	Tercapainya tata kelola administrasi tentang kinerja dan anggaran Polri yang akuntabel	Terselenggaranya hak gaji dan tunjangan anggota dan PNS polri (belum termasuk kebutuhan remunerasi)	100%	100%	Program Dukungan Manajemen & Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Polri	POLRI	93.217,7
b.	Pengembangan Alut dan Alsus Harkamtibmas	Mengaplikasikan teknologi dan peralatan harkamtibmas dengan efektif dan efisien	Persentase kondisi ketersediaan Alut Harkamtibmas terhadap standar	60%	61%	Program Peningkatan Sarana Prasarana Polri	POLRI	411,0
c.	Pengembangan Alut dan Alsus Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana	Mengaplikasikan teknologi dan peralatan penyelidikan dan penyidikan dengan efektif dan efisien	Persentase kondisi ketersediaan Alut Lidik Sidik terhadap standar	35%	36%	Program Peningkatan Sarana Prasarana Polri	POLRI	289,8
d.	Pengembangan Alut dan Alsus Strategi Keamanan	Mengaplikasikan teknologi dan peralatan strategi keamanan dengan efektif dan efisien	Persentase kondisi ketersediaan Alut Strategi Keamanan terhadap standar	50%	51%	Program Peningkatan Sarana Prasarana Polri	POLRI	210,8
e.	Pengembangan Alut dan Alsus Penanggulangan Keamanan Berkadar Tinggi	Mengaplikasikan teknologi dan peralatan penanggulangan keamanan dalam negeri dengan efektif dan efisien	Persentase kondisi ketersediaan Alut Penanggulangan Kamdagri terhadap standar	60%	61%	Program Peningkatan Sarana Prasarana Polri	POLRI	302,5
f.	Pengembangan Alut Komunikasi dan Telematika	Mengaplikasikan teknologi dan peralatan komunikasi dan telematika kepolisian dengan efektif dan efisien	Persentase kondisi ketersediaan Alut Telekomunikasi dan Telematika terhadap standar	50%	51%	Program Peningkatan Sarana Prasarana Polri	POLRI	1,3

BIDANG PEMBANGUNAN : PERTAHANAN DAN KEAMANAN
PRIORITAS BIDANG 4 : Peningkatan Rasa Aman dan Ketertiban Masyarakat

NO	FOKUS PRIORITAS / KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/L EMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI PRIORITAS 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
g.	Pengembangan Alut dan Alsus Kepolisian Strategis	Percepatan modernisasi Alut Polri	Persentase Pencapaian postur pelayanan kepolisian modern menurut Pelayanan Keamanan Prima	40%	41%	Program Peningkatan Sarana Prasarana Polri	POLRI	13.149,1
h.	Pendidikan Pusdiklat-Polwan-Selabrib-Intelkam-Reskrim-Gasum-Lantas-Brimob	Mencetak personel kompeten Polri sesuai lingkup profesi-spesialisasi	Jumlah Pendidikan Pusdiklat-Polwan-Selabrib-Intelkam-Reskrim-Gasum-Lantas-Brimob (orang)	12906	64530 ^{K)}	Program Pendidikan, Pelatihan Polri	POLRI	312,2
i.	Pengembangan kekuatan personel Polri	Menyelenggarakan pendidikan pembentukan peronsel polri baik perwira maupun bintangara	Jumlah Pendidikan Pembentukan Akpol, PPSS, Brigadir (orang)	3350	41250 ^{K)}	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Polri	POLRI	907,8
j.	Peningkatan Kualitas Layanan Publik LLAJ	Meningkatnya pelayanan SIM, STNK, BPKB & Terbangunnya Pusat Pengendali dan Informasi LLAJ	Persentase kecukupan pelayanan SSB per tahun	50%	100%	Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban masyarakat	POLRI	4.862,6
k.	Latihan dan Penyiapan Personil Penanggulangan Keamanan Dalam Negeri	Tersiapkannya kemampuan pemukul penanggulangan keamanan dalam negeri	Jumlah kegiatan latihan personel brimob dalam penanggulangan keamanan dalam negeri	1/hari	1/hari	Program Penanggulangan Gangguan Keamanan Dalam Negeri Berkadar Tinggi	POLRI	4,3
l.	Bina Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Kewilayahan	Meningkatnya kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah tempat tinggalnya	Persentase kecukupan operasi Kepolisian yang menjadi prioritas kebutuhan masyarakat.	45%	46%	Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban masyarakat	POLRI	10.019,9

BIDANG PEMBANGUNAN : PERTAHANAN DAN KEAMANAN
PRIORITAS BIDANG 4 : Peningkatan Rasa Aman dan Ketertiban Masyarakat

NO	FOKUS PRIORITAS / KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ EMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI PRIORITAS 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
II	Fokus Prioritas 2 : Mencegah dan Menanggulangi Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba							2.515,2
a.	Penindakan Tindak Pidana Narkoba	Meningkatnya penyelesaian penanganan perkara Tindak Pidana Narkoba	Jumlah Perkara dan Clerance Rate Tindak Pidana Narkoba tingkat Nasional	85%	88%	Program Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana	POLRI	45,5
b.	Pelaksanaan Kegiatan Diseminasi Informasi di Bidang P4GN	Meningkatnya kegiatan Diseminasi Informasi P4GN	Tingkat pemahaman masyarakat tentang bahaya penyalahgunaan narkoba.	10%	10%	Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)	BNN	92,7
c.	Pelaksanaan <i>Alternative Development</i>	Meningkatnya kegiatan <i>Alternative Development</i>	Jumlah penanam ganja yang beralih ke kegiatan legal produktif	50 Orang	250 ^{K)}	Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)	BNN	27,6
d.	Pelaksanaan Kegiatan Penindakan dan Pengejaran	Meningkatnya Kegiatan Penindakan dan Pengejaran jaringan peredaran gelap narkoba	Jumlah penangkapan tersangka tindak kejahatan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba	10%	10%	Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)	BNN	147,0

BIDANG PEMBANGUNAN : PERTAHANAN DAN KEAMANAN
PRIORITAS BIDANG 4 : Peningkatan Rasa Aman dan Ketertiban Masyarakat

NO	FOKUS PRIORITAS / KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/L EMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI PRIORITAS 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
e.	Pelaksanaan Kegiatan Interdiksi	Meningkatnya kegiatan interdiksi di pintu masuk (Bandara dan Pelabuhan) dan <i>Border line</i>	Jumlah Narkoba ilegal yang disita di Bandara, Pelabuhan, dan <i>Border line</i>	10%	10%	Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)	BNN	37,1
f.	Pelaksanaan Pengembangan Rehabilitasi Instansi Pemerintah	Meningkatnya fasilitas rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba yang dikelola Instansi Pemerintah	Jumlah fasilitas rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba yang dikelola Instansi Pemerintah	-	3 Fasilitas TR ^{k)}	Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)	BNN	279,0
g.	Pelaksanaan Pengembangan Rehabilitasi Berbasis Komponen Masyarakat	Meningkatnya fasilitas rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba yang dikelola Komponen Masyarakat	Jumlah fasilitas rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba yang dikelola Komponen Masyarakat (fasilitas)	20	100 ^{k)}	Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)	BNN	69,8
h.	Peningkatan Kapasitas Pelayanan BNN di Daerah	Terselenggaranya pelayanan P4GN yang dilaksanakan oleh struktur organisasi BNN Propinsi dan Kabupaten/Kota yang vertikal	1. Jumlah BNNP yang terbentuk untuk menyelenggarakan P4GN 2. Jumlah BNNK yang terbentuk untuk menyelenggarakan P4GN	-	14 BNNP; ^{k)} 156 BNNK	Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)	BNN	1.816,5

BIDANG PEMBANGUNAN : PERTAHANAN DAN KEAMANAN
PRIORITAS BIDANG 4 : Peningkatan Rasa Aman dan Ketertiban Masyarakat

NO	FOKUS PRIORITAS / KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ EMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI PRIORITAS 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
III	Fokus Prioritas 3 : Menuntaskan Penanganan Tindak Kejahatan terutama Kejahatan Konvensional							2.839,7
a.	Penindakan Tindak Pidana Umum	Meningkatnya penyelesaian penanganan perkara Tindak Pidana Umum	Jumlah Perkara dan <i>Clerance Rate</i> Tindak Pidana Umum tingkat Nasional	64,08%	67%	Program Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana	POLRI	53,4
b.	Penindakan Tindak Pidana Ekonomi Khusus	Meningkatnya penyelesaian penanganan perkara Tindak Pidana Ekonomi	Jumlah Perkara dan <i>Clerance Rate</i> Tindak Pidana Ekonomi Khusus tingkat Nasional	34,00%	37%	Program Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana	POLRI	53,4
c.	Penindakan Tindak Pidana Korupsi	Meningkatnya penyelesaian penanganan perkara Tindak Pidana Korupsi	Jumlah Perkara dan <i>Clerance Rate</i> Tindak Pidana Korupsi tingkat Nasional	0%	3%	Program Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana	POLRI	8,5
d.	Penindakan Tindak Pidana Kontijensi	Meningkatnya penyelesaian penanganan perkara Tindak Pidana Kontijensi	Jumlah Perkara dan <i>Clerance Rate</i> Tindak Pidana Kontijensi tingkat Nasional	100%	103%	Program Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana	POLRI	26,7
e.	Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Kewilayahan	Meningkatnya <i>Clerance Rate</i> Tindak Pidana di tingkat masyarakat	Jumlah Perkara dan <i>Clerance Rate</i> Seluruh Tindak Pidana di wilayah Polda	55,22%	58%	Program Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana	POLRI	2.697,6

BIDANG PEMBANGUNAN : PERTAHANAN DAN KEAMANAN
PRIORITAS BIDANG 4 : Peningkatan Rasa Aman dan Ketertiban Masyarakat

NO	FOKUS PRIORITAS / KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/L EMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI PRIORITAS 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
IV	Fokus Prioritas 4 : Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat terhadap Polisi							184,8
a.	Pembinaan Profesi	Terselenggaranya disiplin internal anggota polri	Persentase tindak lanjut terhadap pengaduan masyarakat	55%	58%	Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Polri	POLRI	42,2
b.	Pembinaan Pengamanan Internal	Terpeliharanya keamanan internal Polri	Persentase kegiatan penyelidikan dalam pengungkapan kasus-kasus dugaan pelanggaran dan pelanggaran personel Polri	70%	73%	Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Polri	POLRI	80,7
c.	Penyelenggaraan Komisi Kepolisian Nasional	Meningkatnya kualitas penyusunan kebijakan dan partisipasi masyarakat	Persentase jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti	20%	23%	Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Polri	POLRI	61,9
V	Fokus Prioritas 5: Deradikalisasi Penangkalan Terorisme							2.474,3
a.	Ops Gaktib dan Ops Yustisi.	Meningkatnya kondisi ketertiban di daerah rawan.	Persentase kualitas dan kuantitas operasi Gaktib	45%	47%	Program Penggunaan Kekuatan Pertahanan Integratif	MABES TNI	95,6
b.	Operasi Pemberdayaan Wilayah Pertahanan	Terselenggaranya operasi wilayah pertahanan	Persentase kualitas dan kuantitas pembinaan wilayah pertahanan nasional	45%	47%	Program Penggunaan Kekuatan Pertahanan Integratif	MABES TNI	54,7

BIDANG PEMBANGUNAN : PERTAHANAN DAN KEAMANAN
PRIORITAS BIDANG 4 : Peningkatan Rasa Aman dan Ketertiban Masyarakat

NO	FOKUS PRIORITAS / KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ EMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI PRIORITAS 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
c.	Operasi Intelijen Strategis	Dapat ditangkalnya ATHG pertahanan negara.	Prosentase kualitas dan kuantitas data intelijen dan pengamanan yang dibutuhkan	45%	47%	Program Penggunaan Kekuatan Pertahanan Integratif	MABES TNI	267,6 -
d.	Penyelenggaraan Intelijen dan Pengamanan Matra Darat	Kesiapan kekuatan dan kemampuan matra darat	Persentase kecukupan operasional pengamanan personel, material dan dokumen serta efektifitas dan efisiensi <small>deteksi dini</small>	40%	45%	Program Dukungan Kesiapan Matra Darat	TNI AD	731,9 -
e.	Kegiatan Operasi Intelijen Dalam Negeri	Meningkatnya pelaksanaan penyelidikan beraspek dalam negeri	Rasio kecukupan personel daerah terhadap jumlah kabupaten/kota	30%	33%	Program Pengembangan Penyelidikan, Pengamanan, dan Penggalangan Keamanan Negara	BADAN INTELIJEN NEGARA	1.324,6
VI	Fokus Prioritas 6 : Pencegahan dan Penanggulangan Terorisme							3.439,0
a.	Kegiatan koordinasi penanganan kejahatan transnasional dan terorisme	Terselenggaranya koordinasi kebijakan penanganan kejahatan transnasional dan terorisme	Jumlah rapat koordinasi urusan kejahatan dan terorisme (kali)	12	60 ^{K)}	Program Peningkatan Koordinasi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	KEMENKO POLHUKAM	14,5
			Jumlah pemantauan dan evaluasi (kali)	4	20 ^{K)}			

BIDANG PEMBANGUNAN
PRIORITAS BIDANG 4

: PERTAHANAN DAN KEAMANAN
: Peningkatan Rasa Aman dan Ketertiban Masyarakat

NO	FOKUS PRIORITAS / KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/L EMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI PRIORITAS 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
			Jumlah rapat kordinasi urusan terorisme bersama dengan DKPT (kali)	12	60 ^{K)}			
			Jumlah Rapat kordinasi Desk Kordinasi pemberantasan terorisme (kali)	12	60 ^{K)}			
			Jumlah Pemantauan dan Evaluasi perkembangan terorisme termasuk modus operandi (kali)	4	20 ^{K)}			
			Jumlah rapat kordinasi pengelolaan peningkatan kapasitas DKPT menjadi BKPT (kali)	12	60 ^{K)}			
b.	Operasi Militer Selain Perang (OMSP)	Terlaksananya tugas OMSP secara efektif	Jumlah dan cakupan wilayah penyelenggaraan OMSP	30%	32%	Program Penggunaan Kekuatan Pertahanan Integratif	MABES TNI	1.485,0
c.	Kegiatan Penyelenggaraan Dukungan Administrasi Operasi Intelijen	Terselenggaranya dukungan administrasi operasi intelijen	Jumlah anggaran yang tersedia	30%	32%	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya BIN	BADAN INTELIJEN NEGARA	1.055,3

BIDANG PEMBANGUNAN : PERTAHANAN DAN KEAMANAN
PRIORITAS BIDANG 4 : Peningkatan Rasa Aman dan Ketertiban Masyarakat

NO	FOKUS PRIORITAS / KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/L EMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI PRIORITAS 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
d.	Pembinaan forum kemitraan Polisi dan Masyarakat	Meningkatnya jumlah forum kemitraan Polisi dan masyarakat	Jumlah Forum Kemitraan Polmas (orang)	41000	205160 ^{K)}	Pemberdayaan Potensi Keamanan	POLRI	824,5
e.	Penindakan Tindak Pidana Terorisme	Meningkatnya penyelesaian penanganan perkara Terorisme	Jumlah Perkara dan <i>Clarence Rate</i> Tindak Pidana Terorisme tingkat Nasional	100%	103%	Program Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pindana	POLRI	59,7
TOTAL								135.141,9

Keterangan :

^{K)} Angka kumulatif 5 tahun (2010-2014)

BIDANG PEMBANGUNAN : PERTAHANAN DAN KEAMANAN
PRIORITAS BIDANG 5 : Modernisasi Deteksi Dini Keamanan Nasional

NO	FOKUS PRIORITAS / KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIA N/LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI PRIORITAS 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
I	Fokus Prioritas 1 : Memperluas Cakupan Deteksi Dini baik di Luar Negeri maupun Dalam Negeri							1.954,2
a.	Analisa Strategis	Terlaksananya prediksi ancaman, gangguan, hambatan, tantangan dan peluang baik nasional, regional dan global secara tepat waktu dengan data yang up-to-date dan akurat	Persentase cakupan prediksi ancaman, gangguan, hambatan, tantangan dan peluang baik nasional, regional dan global secara tepat waktu dengan data yang up-to-date dan akurat	40%	40%	Program Strategi Pertahanan	KEMENHAN	40,2
b.	Penyelenggaraan Intelijen dan Pengamanan Matra Laut	Meningkatnya produk/data intelijen baik secara kualitas maupun kuantitas serta meningkatnya pengamanan sesuai standar	Persentase keakurasian dan kelengkapan deteksi dan analisis AGHT secara akuntable dan tepat waktu.	65%	84%	Program Dukungan Kesiapan Matra Laut	TNI AL	94,9
c.	Penyelenggaraan Intelijen dan Pengamanan Matra Udara	Peningkatan penyelenggaraan intelijen dan pengamanan matra udara	Persentase kualitas dan kuantitas data intelijen dan pengamanan yang dibutuhkan	35%	40%	Dukungan Kesiapan Matra Udara	TNI AU	21,9

BIDANG PEMBANGUNAN : PERTAHANAN DAN KEAMANAN
PRIORITAS BIDANG 5 : Modernisasi Deteksi Dini Keamanan Nasional

NO	FOKUS PRIORITAS / KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIA N/LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI PRIORITAS 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
d.	Kegiatan Operasi Intelijen Ekonomi	Meningkatnya pelaksanaan penyidikan beraspek ekonomi	Persentase pemantauan intelijen beraspek ekonomi	30%	33%	Program Pengembangan Penyelidikan, Pengamanan, dan Penggalangan Keamanan Negara	BADAN INTELIJEN NEGARA	692,4
e.	Kegiatan Operasi Intelijen Luar Negeri	Meningkatnya pelaksanaan penyelidikan beraspek luar negeri, ekonomi, sosial, budaya	Persentase kecukupan penggelaran pos intelijen luar negeri	30%	33%	Program Pengembangan Penyelidikan, Pengamanan, dan Penggalangan Keamanan Negara	BADAN INTELIJEN NEGARA	192,0
f.	Kegiatan Operasi Kontra Intelijen	Meningkatnya upaya kontra intelijen	Persentase pemantauan intelijen lawan	30%	33%	Program Pengembangan Penyelidikan, Pengamanan, dan Penggalangan Keamanan Negara	BADAN INTELIJEN NEGARA	890,3
g.	Penyelenggaraan Strategi Keamanan dan Ketertiban I	Menurunnya potensi kejahatan berkadar ancaman tinggi	Jumlah operasi pencegahan potensi kejahatan berkadar tinggi bidang Politik (paket)	30	150 ^{K)}	Program Pengembangan Strategi Keamanan dan Ketertiban	POLRI	22,5

BIDANG PEMBANGUNAN : PERTAHANAN DAN KEAMANAN
PRIORITAS BIDANG 5 : Modernisasi Deteksi Dini Keamanan Nasional

NO	FOKUS PRIORITAS / KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIA N/LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI PRIORITAS 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
II	Fokus Prioritas 2 : Memperluas Pengamanan Rahasia Negara Baik di Luar Negeri maupun di Dalam Negeri							2.534,0
a.	Pengamanan Sinyal	Meningkatnya kebijakan, penggelaran infrastruktur, dan layanan pengamanan sinyal	Jumlah layanan pengamanan sinyal (kali)	710	3550 ^{K)}	Program Pengembangan Persandian Nasional	LEMBAGA SANDI NEGARA	2.184,6
b.	Analisa sinyal	Pengamanan persandian melalui analisis teknis sandi dan analisis kriptografi	Jumlah layanan analisa sinyal (paket)	26	130 ^{K)}	Program Pengembangan Persandian Nasional	LEMBAGA SANDI NEGARA	169,8
c.	Operasionalisasi Materiil Sandi	Tersedianya materiil sandi guna mendukung terselenggaranya komunikasi rahasia	Distribusi penggelaran materiil sandi (lokasi)	115	625 ^{K)}	Program Pengembangan Persandian Nasional	LEMBAGA SANDI NEGARA	179,6
TOTAL								4.488,2

Keterangan :

^{K)} Angka kumulatif 5 tahun (2010-2014)

BIDANG PEMBANGUNAN : PERTAHANAN DAN KEAMANAN
PRIORITAS BIDANG 6 : Peningkatan Kualitas Kebijakan Keamanan Nasional

NO	FOKUS PRIORITAS / KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/L EMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI PRIORITAS 2010- 2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
I	Fokus Prioritas 1 : Peningkatan Kapasitas Penyusunan Kebijakan Lembaga Keamanan Nasional							74,5
a.	Perumusan Kebijakan Strategis dan Kebijakan Implementatif	Tersusunnya kelengkapan kebijakan pertahanan negara yang mampu memenuhi kebutuhan nasional dan tantangan global serta diimplementasikan secara sinergis lintas sektor	Persentase kelengkapan kebijakan pertahanan negara yang mampu memenuhi kebutuhan nasional dan tantangan global serta diimplementasikan secara sinergis lintas sektor	45%	45%	Program Strategi Pertahanan	KEMENHAN	40,2
b.	Penyelenggaraan Perumusan Kebijakan Ketahanan Nasional Bidang Lingkungan Strategis Nasional, Lingkungan Strategis Regional, dan Lingkungan Strategis Internasional	Terlaksananya penyelenggaraan perumusan kebijakan Ketahanan Nasional Bidang Lingkungan Strategis Nasional, Lingkungan Strategis Regional, dan Lingkungan Strategis Internasional	Jumlah Kajian Pokja, Pokjasus, Rakertas, Ramusmat, Kirpat bidang lingkungan strategis Nasional, Lingkungan Strategis Regional, dan Lingkungan Strategis Internasional (paket)	40	200 ^{KJ}	Program Pengembangan Kebijakan Ketahanan Nasional	DEWAN KETAHANAN NASIONAL	25,9

BIDANG PEMBANGUNAN : PERTAHANAN DAN KEAMANAN

PRIORITAS BIDANG 6 : Peningkatan Kualitas Kebijakan Keamanan Nasional

NO	FOKUS PRIORITAS / KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ EMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI PRIORITAS 2010- 2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
c.	Penyusunan Rencana dan Pelaksanaan Pengkajian Strategik di Bidang Pertahanan Keamanan	Meningkatnya kualitas penyusunan rencana pengkajian strategik di bidang pertahanan keamanan	Indek pengkajian strategik di bidang pertahanan dan keamanan	50%	52%	Program Pengembangan Ketahanan Nasional	LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL	8,4
TOTAL								74,5

Keterangan :

^{K)} Angka kumulatif 5 tahun (2010-2014)



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2010
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH NASIONAL
(RPJMN)
TAHUN 2010--2014**

**BUKU II
MEMPERKUAT SINERGI ANTARBIDANG PEMBANGUNAN**

**BAB VIII
HUKUM DAN APARATUR**

**Diperbanyak Oleh:
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS)
2010**



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

DAFTAR ISI

BAB VIII HUKUM DAN APARATUR	II.8-1
8.1 Kondisi Umum	II.8-2
8.2 Permasalahan dan Sasaran Pembangunan	II.8-15
8.2.1 Permasalahan	II.8-15
8.2.2 Sasaran	II.8-28
8.3 Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan	II.8-30
8.3.1 Peningkatan Efektivitas Peraturan Perundang-Undangan	II.8-31
8.3.2 Peningkatan Kinerja Lembaga di Bidang Hukum	II.8-32
8.3.3 Peningkatan Penghormatan, Pemajuan dan Penegakan HAM	II.8-33
8.3.4 Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN	II.8-33
8.3.5 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	II.8-35
8.3.6 Peningkatan Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	II.8-36
8.3.7 Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	II.8-38



BAB VIII

HUKUM DAN APARATUR

Pembangunan nasional yang telah dilaksanakan selama ini telah menunjukkan kemajuan di berbagai bidang kehidupan masyarakat, yang meliputi bidang sosial budaya dan kehidupan beragama, ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi, politik, pertahanan dan keamanan, hukum dan aparatur, pembangunan wilayah dan tataruang, penyediaan sarana dan prasarana, serta pengelolaan sumber daya alam.

Khusus mengenai pembangunan hukum, diarahkan untuk mendukung terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan; mengatur permasalahan yang berkaitan dengan ekonomi, terutama dunia usaha dan dunia industri; serta menciptakan iklim yang kondusif bagi investasi, terutama penegakan dan perlindungan hukum sebagaimana diatur dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005--2025, yang tertuang dalam UU No. 17 Tahun 2007. Lebih jauh, pembangunan hukum juga diarahkan untuk menghilangkan kemungkinan terjadinya tindak pidana korupsi serta mampu menangani dan menyelesaikan secara tuntas permasalahan yang terkait dengan kolusi, korupsi, nepotisme (KKN). Untuk itu, pembangunan hukum dilaksanakan melalui pembaruan materi hukum dengan tetap memperhatikan kemajemukan tatanan hukum yang berlaku dan pengaruh globalisasi sebagai upaya untuk meningkatkan kepastian dan perlindungan hukum, penegakan hukum dan hak-hak asasi manusia (HAM), kesadaran hukum, serta pelayanan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran, ketertiban dan kesejahteraan dalam rangka penyelenggaraan negara yang makin tertib, teratur, lancar, serta berdaya saing global. Sedangkan pembangunan bidang aparatur negara dilakukan melalui reformasi birokrasi untuk meningkatkan profesionalisme aparatur negara dan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, di pusat dan di daerah agar mampu mendukung keberhasilan pembangunan di bidang-bidang lainnya.

Dengan arah pembangunan bidang hukum dan aparatur negara seperti yang diuraikan di dalam RPJPN 2005--2025 tersebut di atas, hukum dan aparatur negara mempunyai peranan yang sangat penting bagi tercapainya sasaran pembangunan bidang pembangunan lainnya. Oleh karena itu, pembangunan bidang hukum dan aparatur negara selalu menjadi prioritas dari tahun ke tahun. Pembangunan bidang hukum dan aparatur negara selama ini telah menunjukkan kemajuan yang berarti dan telah ikut memberikan kontribusi bagi pencapaian sasaran pembangunan. Namun, disadari bahwa kemajuan yang dicapai itu belum cukup kuat untuk menghadapi tantangan yang ada, yaitu memenuhi tuntutan masyarakat dan persaingan global yang semakin ketat. Untuk memenuhi tuntutan tersebut, pembangunan hukum dan aparatur negara harus menjadi prioritas dalam pembangunan ke depan.

Dalam RPJMN 2010--2014 ini, dalam rangka mendukung terwujudnya Indonesia yang sejahtera, demokratis, dan berkeadilan, kebijakan pembangunan di bidang hukum dan aparatur diarahkan pada perbaikan tata kelola pemerintahan yang baik, dengan strategi; (1) peningkatan efektivitas peraturan perundang-undangan; (2) peningkatan kinerja lembaga di bidang hukum; (3) peningkatan penghormatan, pemajuan, dan penegakan HAM; (4) peningkatan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN); (5) peningkatan kualitas pelayanan publik; (6) peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi; (7) pemantapan pelaksanaan reformasi birokrasi.

8.1 Kondisi Umum

Penegakan supremasi hukum (*rule of law*) merupakan salah satu prasyarat yang sangat penting untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Dalam praktik penyelenggaraan negara hukum, fungsi pemerintahan dilaksanakan oleh aparatur negara berdasarkan koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk itu, upaya memantapkan peran aparatur negara dalam pembangunan nasional secara keseluruhan menjadi sangat signifikan. Betapa pun baiknya kebijakan dan aturan yang dibuat dan ditetapkan, apabila tidak dilaksanakan oleh aparatur negara yang kompeten dan profesional untuk memberikan pelayanan yang cepat dan bermutu kepada masyarakat, maka rasa keadilan masyarakat masih tetap jauh dari harapan.

Dari pelaksanaan RPJMN 2004--2009, pembangunan bidang hukum dan aparatur telah mencapai berbagai kemajuan, yang dapat diukur melalui penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Berkaitan dengan sasaran periode tersebut, yang meliputi penataan kembali NKRI, dalam membangun Indonesia yang aman dan damai, yang adil dan demokratis, dengan tingkat kesejahteraan yang lebih baik, yang dapat digambarkan dengan berbagai perkembangan dalam hal kehidupan berkonstitusi, pembenahan peraturan perundang-undangan, perbaikan pelayanan publik, reformasi birokrasi, akuntabilitas pemerintahan, pemberantasan korupsi, kinerja lembaga penegak hukum dan penghormatan terhadap HAM.

Efektivitas Peraturan Perundang-undangan. Semakin meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap konstitusi tercermin dengan semakin banyaknya *judicial review* terhadap undang-undang yang merugikan kepentingan rakyat dan berseberangan dengan konstitusi. Setidaknya sampai dengan tahun 2009, terdapat 92 UU yang diuji. Selain itu, penegakan konstitusi telah dilakukan melalui penyelesaian perselisihan hasil Pemilu/Pemilukada. Sampai dengan tahun 2009 telah diselesaikan 69 perkara Pilpres dan 44 perkara Pilkada. Meningkatnya pemahaman terhadap konstitusi, tidak terlepas dari adanya dukungan terhadap proses keterbukaan, termasuk transparansi putusan Mahkamah Konstitusi yang langsung dapat diakses oleh publik melalui media elektronik. Keterbukaan informasi memiliki peran yang sangat strategis untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap kinerja di bidang hukum.

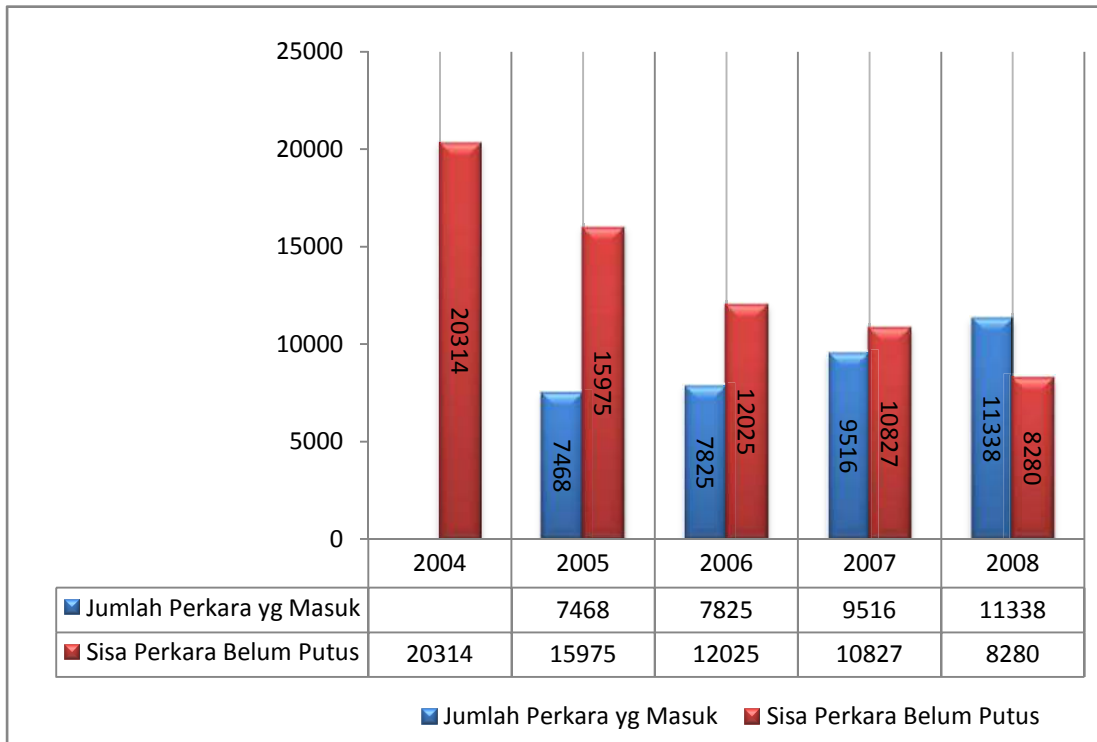


Pembenahan peraturan perundang-undangan sampai dengan tahun 2009 dilakukan melalui upaya mengatasi disharmoni peraturan perundang-undangan; membatalkan peraturan daerah yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan pertimbangan antara lain, bertentangan dengan kepentingan umum, bias jender, tidak berpihak pada kelompok miskin (*pro poor*), dan bertentangan dengan HAM. Sejak 2004 hingga Agustus 2009, terdapat lebih kurang 985 peraturan daerah yang telah dibatalkan, sejalan dengan pelaksanaan desentralisasi berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Kinerja Lembaga di Bidang Hukum. Keberhasilan pembangunan hukum tidak terlepas dari peran lembaga peradilan. Penanganan perkara di empat lingkungan peradilan, yaitu lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara, menunjukkan kinerja yang meningkat dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Jika dibandingkan dengan tahun 2005 dengan tahun 2008, perkara yang masuk ke Mahkamah Agung meningkat sebesar 51% (lihat Grafik 8.1). Dari sisi perkara yang belum diputus efektivitas kinerja MA juga menunjukkan peningkatan dengan menurunnya jumlah sisa perkara (*backlog cases*), dengan kondisi sisa perkara pada tahun 2004 sebanyak 20.314 perkara, menurun sampai dengan 8.280 perkara di tahun 2008.

Untuk penanganan perkara kasasi, telah digunakan indikator pengukuran kinerja penanganan perkara, seperti rasio penyelesaian perkara, dan ukuran usia perkara yang tersisa. Dalam rangka mewujudkan transparansi putusan pengadilan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung nomor 144/KMAVII/2007, masyarakat juga telah dapat mengakses 10.610 hasil putusan di situs Mahkamah Agung.

GRAFIK 8.1
GRAFIK PERBANDINGAN PERKARA MASUK DENGAN SISA PERKARA
TAHUN 2004--2008



Sumber: Laporan Tahunan Mahkamah Agung 2008 (April 2009).

Proses pengawasan secara internal dan eksternal sebagai *checks and balances* terhadap kinerja lembaga di bidang hukum sangat perlu dilakukan, agar tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan. Dengan ditandatanganinya surat keputusan bersama antara ketua Mahkamah Agung dengan Ketua Komisi Yudisial No.047/KMA/SK/IV/2009/2.02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, maka proses pengawasan terhadap perilaku hakim kini telah dilakukan oleh kedua lembaga tersebut. Dengan adanya proses pengawasan yang berjalan dengan baik diharapkan dapat mewujudkan lembaga peradilan yang bersih, transparan, dan profesional. Selain itu, proses seleksi, promosi, mutasi, dan pelatihan terhadap aparat penegak hukum juga harus terus diperbaiki untuk menghasilkan aparat penegak hukum yang berintegritas dan berkualitas tinggi.

Upaya mempercepat penanganan perkara di Kejaksaan, telah dilaksanakan melalui program *Quick Win*, untuk membangun kembali kepercayaan masyarakat (*public trust building*) kepada Kejaksaan Agung dalam waktu yang relatif cepat. Program tersebut difokuskan pada percepatan penanganan perkara pidana umum dan pidana



korupsi, sistem informasi *online* penanganan perkara pidana korupsi, fasilitas pengaduan masyarakat di *website*, dan sistem informasi *online* penanganan laporan pengaduan. Program *Quick Win* telah dilakukan sejak September 2008, pada empat instansi percontohan, yaitu Kejaksaan Tinggi DKI, Kejaksaan Tinggi Banten, Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dan Kejaksaan Negeri Tangerang.

Penghormatan, Pemajuan, dan Penegakan Hak Asasi Manusia. Pembangunan hak asasi manusia sampai dengan tahun 2009 terus dilaksanakan melalui pelaksanaan Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (ICESCR) 1966 serta Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR) 1966, yang diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang *Pengesahan Internasional Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang *Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights*.

Indonesia juga telah melakukan penandatanganan beberapa *optional protocol* dan ratifikasi yang terkait dengan penanganan hak asasi manusia, seperti Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990; Konvensi Anti Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW), melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984; Konvensi Penghapusan Diskriminasi Rasial, melalui Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1998, Konvensi Anti Penyiksaan melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998, dan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. seperti pencapaian *Millenium Development Goal* (MDG's), yang telah menjadi kewajiban Indonesia untuk menindaklanjuti pengintegrasian dan penyesuaiannya dalam lingkup pelaksanaannya di semua pihak yang terkait. Untuk mendukung pelaksanaan hak asasi manusia di daerah, sampai dengan bulan Juli tahun 2009 telah dibentuk 407 Panpel RANHAM kab/kota dan 33 panpel RANHAM Propinsi yang dalam pembentukannya bekerjasama dengan pemerintah daerah setempat.

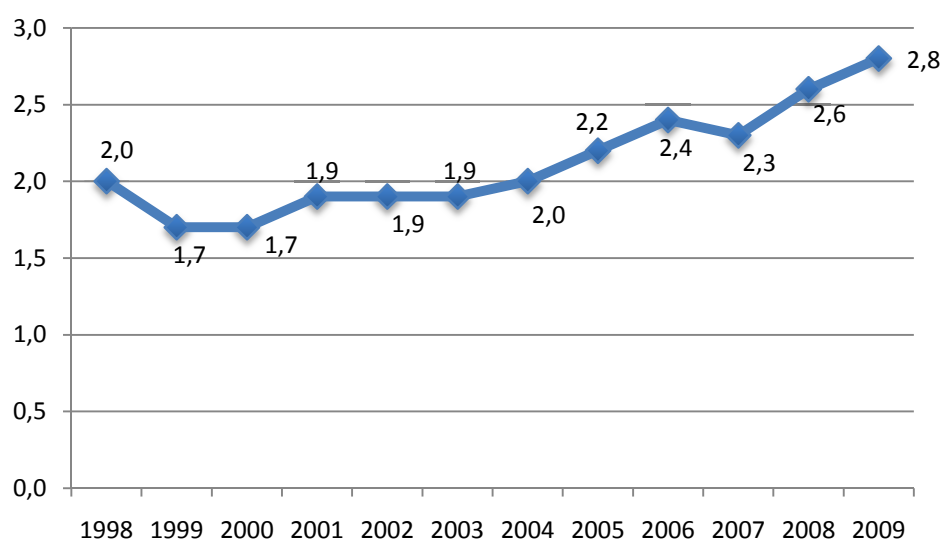
Dalam rangka mendorong pelaksanaan peradilan khususnya dalam penanganan tindak pidana korupsi dan pelanggaran HAM, yang melibatkan kelompok elit dan pejabat negara, melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, pemerintah telah membentuk Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Dengan adanya lembaga ini diharapkan peran masyarakat dalam proses penegakan hukum akan lebih baik dan tidak hanya terbatas pada penyampaian laporan, tetapi juga ikut aktif sebagai saksi dalam proses peradilan.

Selain itu, Pemerintah Indonesia telah meluncurkan Strategi Nasional Akses terhadap keadilan dalam rangka pemberian akses hukum kepada masyarakat miskin dan terpinggirkan yang menekankan desakan untuk melakukan reformasi keadilan pada semua bidang kehidupan yang mendorong perubahan posisi Indonesia yang lebih baik untuk mempromosikan hukum, keadilan dan hak asasi manusia bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan. Strategi Nasional Akses terhadap Keadilan terfokus pada delapan area permasalahan di Indonesia yaitu: (1) Bidang Reformasi Hukum dan Peradilan, (2)

Bidang Bantuan Hukum, (3) Bidang Tata Kelola Pemerintah Lokal, (4) Bidang Tanah dan Sumber Daya Alam, (5) Kelompok Perempuan, (6) Kelompok Anak, (7) Kelompok Tenaga Kerja, dan (8) Kelompok Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN. Upaya mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN telah menunjukkan hasil yang nyata. Hal ini dapat dilihat dari berbagai indikator, antara lain Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia yang diterbitkan Transparansi Internasional, telah menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun, dari yang semula 1,7 pada tahun 1999 menjadi 2,8 pada tahun 2009 (lihat Grafik 8.2).

GRAFIK 8.2
PERKEMBANGAN SKOR IPK INDONESIA



Sumber: Transparansi Internasional; IPK :0-10 (Terkorup-Terbekas)

Peningkatan integritas birokrasi ditunjukkan pula dari semakin meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, yang dapat dilihat dari opini BPK atas laporan keuangan pemerintah. Meskipun opini BPK atas laporan keuangan pemerintah pusat masih menunjukkan *disclaimer* dari tahun ke tahun, namun kemampuan pemerintah baik pusat maupun daerah untuk menyajikan laporan keuangan sejak tahun 2005 telah memperlihatkan kemajuan yang signifikan dalam sejarah praktik penyelenggaraan pengelolaan keuangan negara. Di samping itu, kualitas opini BPK atas laporan keuangan instansi pusat menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. (lihat Tabel 8.1).

TABEL 8.1
PERKEMBANGAN OPINI BPK ATAS LAPORAN KEUANGAN
KEMENTERIAN/LEMBAGA (LKKL)
2006--2008

Uraian	2006		2007		2008	
	Jumlah K/L	%	Jumlah K/L	%	Jumlah K/L	%
1. Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	7	8,75	16	19,75	35	42,17
2. Wajar Dengan Pengecualian (WDP)	37	53,75	31	38,27	30	36,14
3. Tidak Memberikan Pendapat (TMP)	36	45,00	33	40,74	18	21,69
4. Tidak Wajar (TW)	0	0,00	1	1,23	0	0,00
Jumlah	80	100	81	100	83	100

Sumber: Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2009, BPK-RI

Kemudian, opini BPK terhadap LKPD Tahun 2006--2008 memperlihatkan perkembangan positif walaupun belum terlalu signifikan seperti opini BPK atas LKKL. Kemajuan opini pemeriksaan LKPD ditunjukkan dengan adanya peningkatan jumlah pemerintah daerah yang memperoleh opini WTP, yaitu dari tiga pemda pada tahun 2006 menjadi 8 pemda pada tahun 2008. (lihat Tabel 8.2.).

TABEL 8.2
PERKEMBANGAN OPINI BPK ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
(LKPD)
2006--2008

Uraian	2006		2007		2008*)	
	Jumlah Pemda	%	Jumlah Pemda	%	Jumlah Pemda	%
1. Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	3	0,65	4	0,86	8	2,73
2. Wajar Dengan Pengecualian (WDP)	326	70,41	283	60,60	217	74,06
3. Tidak Memberikan Pendapat (TMP)	106	22,89	122	26,12	47	16,04
4. Tidak Wajar (TW)	28	6,05	58	12,42	21	7,17
Jumlah	463	100	466	100	293	100

Sumber: Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2009, BPK-RI. *) Data per 31 Juli 2009. Data Semester II Tahun 2009 belum terbit.

Kemajuan di dalam peningkatan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN tersebut dicapai melalui upaya penindakan atas praktik KKN secara tegas dan tidak pandang bulu melalui jalur hukum dan pencegahan terjadinya praktik KKN melalui perbaikan tata kelola pemerintahan di lingkungan birokrasi pemerintahan.

Di bidang penindakan dalam rangka pemberantasan korupsi, upaya penegakan hukum terus dilakukan terutama dalam penanganan perkara-perkara korupsi. Lembaga kejaksaan telah menetapkan prioritas kepada jajaran kejaksaan di bawahnya untuk melakukan penanganan perkara korupsi dengan optimal, dengan penetapan target penanganan perkara korupsi mulai dari Kejaksaan Agung sampai dengan Cabang Kejaksaan Negeri. Di samping itu, KPK telah berhasil menangani perkara tindak pidana korupsi yang menarik perhatian masyarakat luas bahkan juga yang melibatkan pejabat negara baik yang berasal dari kalangan eksekutif, legislatif, maupun tindak pidana korupsi yang melibatkan aparat penegak hukum itu sendiri.

Upaya penegakan hukum tidak hanya terbatas pada upaya untuk memasukkan pelaku tindak pidana korupsi ke dalam penjara saja, tetapi juga untuk mendapatkan kembali harta dan aset negara yang dikorupsikan. Selama periode 2005 sampai Juni 2009, KPK berhasil menyelamatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 564,807 miliar, penertiban aset/barang milik negara sebanyak Rp 563,5 miliar, dan potensi



kerugian negara dari sektor hulu migas sebesar US\$ 220,4 Juta (ekuivalen sekitar Rp2,6 triliun). Total penyelamatan aset adalah sebesar lebih kurang Rp 3,728 Triliun. Sedangkan pada periode Tahun 2004 sampai dengan September 2009, Kejaksaan Agung maupun Kejaksaan Tinggi seluruh Indonesia telah berhasil menyelamatkan keuangan negara sekitar Rp 13,3 triliun dan dalam bentuk mata uang asing sekitar US\$ 18,0 juta.

Upaya penegakan hukum di bidang pemberantasan korupsi ini juga dilaksanakan oleh lembaga peradilan, yang dalam pelaksanaan amanat UU No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, pembentukan pengadilan khusus yang menangani perkara Tindak Pidana Korupsi harus dibentuk selambatnya dalam kurun waktu 2 (dua) tahun sejak UU tersebut berlaku. Dengan demikian, diharapkan penegakan hukum khususnya dalam rangka pemberantasan korupsi dapat dilakukan dengan lebih optimal.

Dalam rangka menciptakan sensitivitas masyarakat terhadap pemberantasan korupsi, telah dilakukan pendidikan anti korupsi untuk pelajar dan mahasiswa melalui *training of trainer* (TOT), dan TOT Guru Antikorupsi. Hal tersebut terlihat dari indikator keterlibatan masyarakat dalam upaya pemberantasan korupsi, antara lain dengan meningkatnya jumlah pengaduan masyarakat mengenai adanya indikasi tindak pidana korupsi. Dari data KPK tahun 2004 sampai dengan bulan Juni 2009 telah terkumpul laporan sebanyak 35.810 pengaduan.

Upaya pemberantasan korupsi yang bersifat pencegahan dilakukan melalui beberapa kegiatan, antara lain adalah konsultasi dan kampanye publik Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi (RAN PK) yang terdiri atas strategi pencegahan, penindakan, dan pemantauan dan evaluasinya. Dalam pelaksanaannya, inisiatif upaya pencegahan korupsi telah dikembangkan sampai ke tingkat daerah dalam bentuk Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi (RAD PK). Sampai dengan akhir Oktober 2009, kegiatan tersebut telah dilakukan pada beberapa kementerian/lembaga, 24 provinsi, beberapa kabupaten/kota termasuk menerapkan *citizen report card*, berupa laporan tentang perilaku koruptif yang masih terjadi pada lembaga pelayanan publik di lingkungan pemerintahan. Di sisi lainnya, Pemerintah juga telah melakukan *pilot project* penerapan model *island of integrity* di beberapa daerah, yaitu Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Bali, yang berkomitmen tinggi untuk menerapkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik. *Pilot project* ini dilanjutkan dengan penerapan kesepakatan kinerja antara para kepala daerah dan pejabat di bawahnya.

Pemerintah Indonesia telah meratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Anti Korupsi (*The United Nation Convention Against Corruption/UNCAC*), dengan UU No. 7 Tahun 2006. Ketentuan-ketentuan yang penting dari konvensi tersebut antara lain adalah upaya pencegahan, penindakan, perundang-undangan, penyuaipan di sektor publik, penyelamatan aset, kerja sama internasional dan mekanisme pelaporan. Sebagai implementasi UNCAC tersebut, telah disusun Strategi Nasional Pemberantasan Korupsi 2010--2025 yang secara komprehensif akan menjadi acuan utama pemberantasan korupsi baik pada tingkat nasional maupun daerah, sejalan dengan

UNCAC.

Upaya lainnya yang telah dilakukan dalam rangka pencegahan korupsi adalah penataan sistem dan penguatan kelembagaan pengawasan. Dalam rangka penataan sistem pengawasan, fungsi pengawasan ekstern dan pengawasan intern telah dipertegas, dengan terbitnya UU No. 15 Tahun 2006 tentang BPK beserta peraturan pelaksanaannya serta terbitnya PP No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Dengan kedua peraturan tersebut diharapkan terdapat sinergi pelaksanaan fungsi pengawasan ekstern dan intern dalam rangka meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah. Pemeriksaan ekstern menjadi kewenangan BPK, sedangkan aparat pengawasan intern pemerintah bertugas menjamin pelaksanaan sistem pengendalian intern instansi pemerintah. Sejak terbitnya UU No 15 Tahun 2006 tentang BPK tersebut, kini BPK telah memiliki kantor perwakilan di seluruh provinsi dari sebelumnya yang hanya 5 kantor perwakilan. Sejalan dengan pengembangan organisasi BPK, hingga saat ini BPK telah merekrut lebih dari 5.000 orang auditor baru. Penting pula dikemukakan di sini, salah satu aspek yang menonjol dalam kaitannya dengan peran BPK dalam pemberantasan korupsi adalah keharusan BPK melaporkan kepada instansi penegak hukum selambat-lambatnya 1 bulan sejak ditemukannya indikasi yang kuat tentang adanya tindak pidana korupsi dalam proses pemeriksaan. Di samping itu, BPK juga telah meningkatkan transparansi dalam proses pemeriksaan dengan mencantumkan secara terbuka laporan hasil pemeriksaannya di situs web BPK. Hal ini mendorong partisipasi masyarakat dalam ikut mengawasi jalannya pemerintahan dan diyakini memiliki pengaruh yang sangat signifikan bagi upaya pemberantasan korupsi.

Selanjutnya, upaya penguatan kapasitas pengawasan juga dilakukan melalui penyempurnaan prosedur pengawasan, peningkatan kuantitas dan kualitas aparat pengawasan, peningkatan tindak lanjut atas hasil pemeriksaan/audit, dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan. Dalam kaitannya dengan upaya ini, telah dilakukan penataan kapasitas pengawasan pada instansi pengawasan di tingkat pusat, 30 bawasda provinsi, dan 20 bawasda kabupaten/kota, serta peningkatan kualitas auditor berupa beasiswa bagi 650 orang staf inspektorat jenderal departemen dan inspektorat (bawasda) provinsi dan kabupaten/kota untuk mengikuti pendidikan S-1 dan S-2 Bidang Akuntansi Pemerintahan/Pengawasan Keuangan Negara di 36 perguruan tinggi di dalam negeri.

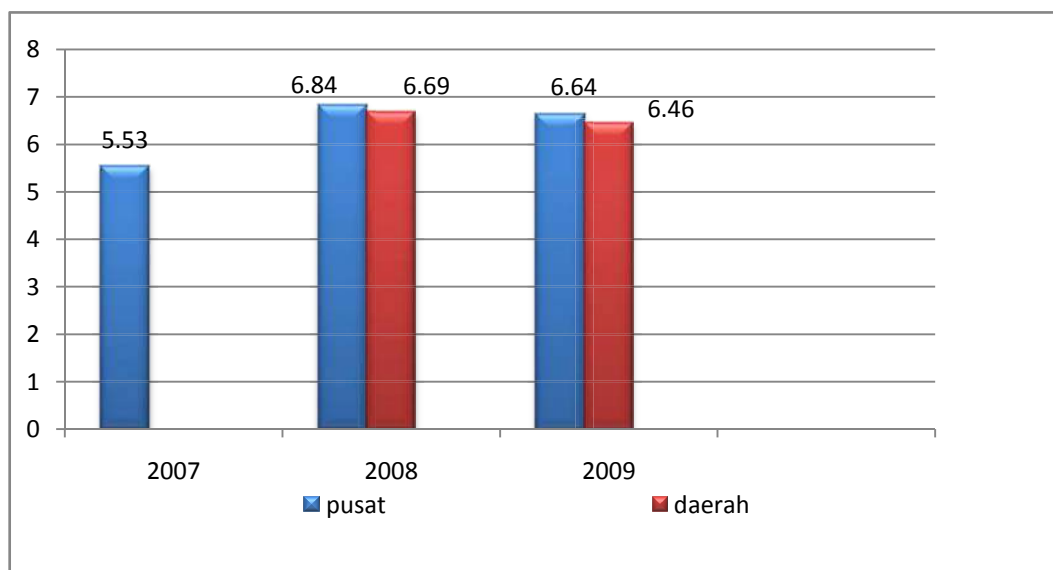
Aspek lainnya, untuk memastikan bahwa manajemen pengawasan dapat berjalan dengan optimal, BPKP telah melakukan evaluasi atas laporan APIP dari setiap instansi pemerintah. Jumlah laporan APIP yang telah dievaluasi adalah sebesar 94% dari keseluruhan jumlah instansi pemerintah. Persentase tindak lanjut hasil pengawasan (TLHP) mencapai 32,96% untuk APIP dan 83,27% untuk BPKP. Kemudian, persentase pengaduan masyarakat (dumas) tersalur yang dapat ditindaklanjuti oleh APIP adalah sebesar 25%. Pengaduan masyarakat ini merupakan salah satu instrumen pengawasan yang terus dikembangkan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas publik. Di

samping itu, untuk mencegah praktik KKN pada lingkungan birokrasi telah diterapkan pakta integritas khususnya bagi pejabat yang memiliki tugas yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara, pengadaan barang/jasa dan jabatan strategis lainnya.

Di bidang pengadaan barang dan jasa publik terus dilakukan perbaikan, seperti penerapan proses pengadaan melalui sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) yang telah diterapkan di 47 instansi pemerintah dan pemerintah daerah. Penerapan *e-procurement* tersebut semakin meningkatkan kualitas proses pengadaan secara lebih efektif, efisien, akuntabel serta didasarkan pada prinsip persaingan usaha yang sehat, transparan, terbuka dan perlakuan adil bagi semua pihak. Dari segi efisiensi, proses pengadaan barang dan jasa dengan menggunakan sistem *e-procurement* telah menghasilkan penghematan kurang lebih 15%, mencegah kebocoran dan penyalahgunaan penggunaan keuangan negara.

Pelayanan Publik. Hingga saat ini, upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat telah menunjukkan kemajuan yang berarti. Hal ini salah satunya dapat ditunjukkan dari skor integritas pelayanan publik yang diterbitkan KPK. Pada tahun 2007, rata-rata skor integritas dari instansi pusat adalah 5.53, sedangkan pada tahun 2008 meningkat menjadi 6.84. Namun, pada tahun 2009 kembali menurun menjadi 6,64 dari skala 10. Untuk unit pelayanan publik di daerah, survei integritas pelayanan publik baru dilakukan pada tahun 2008, yang skor integritasnya secara rata-rata dari unit pelayanan publik yang disurvei adalah 6.69 (Lihat Grafik 8.3).

GRAFIK 8.3
PERKEMBANGAN SKOR INTEGRITAS PELAYANAN PUBLIK 2007--2009



Sumber: KPK (diolah)

Upaya peningkatan kualitas pelayanan publik tersebut dilakukan melalui berbagai langkah kebijakan. Kebijakan yang paling mendasar adalah mengubah *mindset* para birokrat dari bermental penguasa menjadi birokrat yang bermental pelayan masyarakat. Kebijakan lainnya adalah penataan kelembagaan pelayanan publik, penyederhanaan prosedur pelayanan, penerapan standar pelayanan minimal, peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam manajemen pelayanan, serta penerapan sistem manajemen mutu dalam pelayanan publik, termasuk manajemen penanganan pengaduan masyarakat.

Dalam rangka penataan kelembagaan, telah dikeluarkan kebijakan mengenai unit pelayanan terpadu satu pintu yang telah dilaksanakan di berbagai daerah. Jumlah kabupaten/kota yang memiliki unit pelayanan terpadu semakin banyak dari tahun ke tahun. Sampai akhir tahun 2008 telah terdapat 329 pemerintah daerah yang telah membentuk unit pelayanan satu pintu atau dikenal dengan *one stop services* (OSS) (lihat Tabel 8.3). Kemudian, pemanfaatan TIK sebagai upaya memberikan pelayanan yang cepat, murah, akurat, dan akuntabel sudah diterapkan pada berbagai sektor pelayanan, seperti pelayanan pengadaan barang dan jasa (*e-procurement*), kepabeanan, perpajakan, pertanahan, sisminbakum, *e-learning*, keimigrasian, SIM, kependudukan, haji dan lain sebagainya.

TABEL 8.3
PERKEMBANGAN JUMLAH ONE STOP SERVICE (OSS) DI DAERAH

Daerah	2004	2005	2006	2007	2008
Propinsi	-	-	-	-	2
Kabupaten	-	5	70	217	234
Kota	-	1	25	69	93
Total	-	6	95	286	329

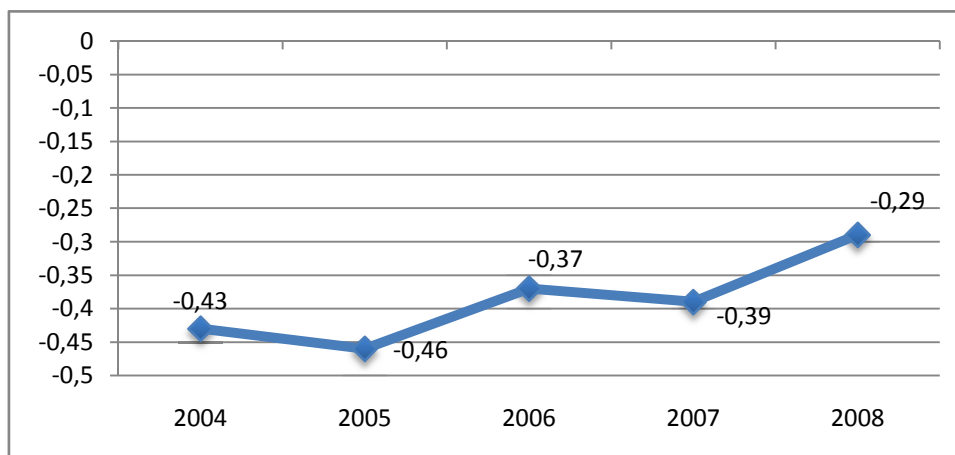
Sumber: Kementerian Negara PAN dan RB, 2009

Di tengah berbagai kemajuan tersebut, upaya untuk memperkokoh landasan kebijakan bagi upaya peningkatan kualitas pelayanan publik terus dilakukan. Untuk itu, pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, di samping sebelumnya telah terbit Undang-Undang No. 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI. Kedua kebijakan tersebut diharapkan dapat lebih memperkuat landasan dalam memberikan jaminan pelayanan yang lebih berkualitas kepada masyarakat. Selanjutnya, untuk menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif, khususnya guna mempermudah pelayanan di bidang penanaman modal, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 27 Tahun 2009 tentang

Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang menyeragamkan pelayanan penanaman modal di provinsi dan kabupaten/kota, disertai dengan sistem pelayanan berbasis TIK.

Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi. Upaya meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi juga telah mengalami kemajuan yang menggembirakan dari tahun ke tahun. Dari hasil evaluasi terhadap laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP), diketahui bahwa instansi yang dinilai akuntabel kinerjanya semakin meningkat dari tahun ke tahun, yaitu 30% instansi pada 2004, menjadi 44,10% instansi pada tahun 2005, 45,79% pada tahun 2006, dan menjadi 60,73% instansi pada tahun 2007. Meningkatnya akuntabilitas kinerja sekaligus menunjukkan meningkatnya efektivitas instansi pemerintah dalam mencapai sasaran-sasaran kinerjanya. Data ini didukung pula oleh penilaian Bank Dunia melalui salah satu *Governance Indicator*-nya, yaitu indikator *Government Effectiveness* (Efektivitas Pemerintahan). Berdasarkan indikator tersebut Indonesia memperoleh skor -0,43 pada tahun 2004 dan meningkat menjadi -0,29 pada tahun 2008 (lihat Grafik 8.4). Perkembangan skor tersebut memperlihatkan adanya kemajuan kapasitas kelembagaan birokrasi pemerintah meskipun belum signifikan. Keseluruhan skor penilaian tersebut mencerminkan kemampuan pemerintah untuk menyelenggarakan pelayanan publik dan membuat kebijakan yang paramater pengukurannya meliputi kualitas pelayanan publik, kualitas birokrasi, kompetensi aparat pemerintah, dan independensi PNS terhadap tekanan politik.

GRAFIK 8.4
PERKEMBANGAN SKOR *GOVERNMENT EFFECTIVENESS* INDONESIA



Sumber : *The World Bank 2009* (diolah)

Upaya meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi tersebut dilakukan melalui upaya penataan kelembagaan dan ketalaksanaan, peningkatan kualitas sumberdaya manusia aparatur, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, penyempurnaan sistem perencanaan dan penganggaran, serta pengembangan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan aparaturnya.

Penataan kelembagaan antara lain dilakukan dengan menerbitkan PP No. 41 Tahun 2007 tentang Perubahan atas PP Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah. Dengan PP ini seluruh provinsi dan kabupaten/kota telah melakukan penyesuaian struktur organisasi dan tata kerjanya sehingga menjadi lebih proporsional, efektif, dan efisien serta sesuai dengan kebutuhan nyata daerah. Untuk penataan instansi pemerintah pusat, khususnya menyangkut kementerian negara telah terbit UU No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Dengan adanya UU ini, Presiden mempunyai rujukan yang baku dalam menyusun kementerian yang diperlukan. Untuk melaksanakan ketentuan pada UU No 39 Tahun 2008 tersebut, telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara.

Untuk mendukung penataan kelembagaan, secara beriringan telah ditempuh upaya untuk memperkuat aspek ketatalaksanaan di lingkungan instansi pemerintah, seperti perbaikan *standard operating procedur* (SOP) dan penerapan *e-government* di berbagai instansi. Sejalan dengan pengembangan manajemen kinerja di lingkungan instansi pemerintah, seluruh instansi pusat dan daerah diharapkan secara bertahap dalam memperbaiki sistem ketatalaksanaan dengan menyiapkan perangkat SOP, mekanisme kerja yang lebih efisien dan efektif, dan mendukung upaya peningkatan akuntabilitas kinerja.

Selanjutnya, dalam rangka peningkatan kualitas SDM Aparatur, telah dilakukan upaya pemantapan penerapan sistem merit dalam penyelenggaraan manajemen PNS, seperti penerimaan pegawai yang semakin terbuka dan kompetitif, penyelenggaraan diklat aparatur berbasis kompetensi, pemanfaatan pusat penilaian kompetensi, serta meluasnya penerapan sistem promosi dan mutasi yang lebih terbuka dan berbasis kompetensi. Di samping itu, sejalan dengan perkembangan dinamika kehidupan politik, upaya mengurangi PNS dari pengaruh politik semakin dimantapkan, antara lain melalui UU Nomor 10 tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD. Di dalam pasal 12 dan pasal 50 disebutkan bahwa setiap PNS yang ingin mencalonkan diri sebagai anggota legislatif harus terlebih dahulu mengundurkan diri dari PNS. Begitu pula dengan larangan ikut serta dalam kampanye sebagaimana disebutkan dalam pasal 84 ayat 2 serta Pasal 41 ayat 2 UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Dengan demikian PNS diharapkan dapat bekerja secara profesional dan netral untuk menunjukkan kinerja yang optimal bagi pencapaian sasaran kinerja instansinya.

Sebagai pelaksanaan Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan



Negara dan UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, telah mulai dilaksanakan sistem perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja. Hal itu terus dimantapkan dengan dilakukannya reformasi sistem perencanaan dan penganggaran, yaitu dalam penyusunan RPJMN 2010--2014, penyusunan renstra K/L tahun 2010-2014, dan selanjutnya dalam penyusunan RKP dan dokumen anggarannya. Dengan pelaksanaan sistem perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja dengan lebih mantap, diharapkan efektivitas dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dapat terus meningkat dari tahun ke tahun.

Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Selanjutnya, guna mempercepat peningkatan kinerja birokrasi, pada tahun 2007 pemerintah mencanangkan pelaksanaan reformasi birokrasi instansi (RBI), yang diawali dengan pelaksanaan pilot project di 3 instansi, yaitu Departemen Keuangan, Mahkamah Agung, dan Badan Pemeriksa Keuangan. Untuk mempercepat dan memperluas pelaksanaan reformasi birokrasi instansi tersebut, telah dibentuk Tim Reformasi Birokrasi Nasional yang dipimpin oleh Menteri Negara PAN. Sebagai tindaklanjutnya, agar pelaksanaan reformasi birokrasi instansi dapat berjalan secara komprehensif, terukur, sistematis, dan terencana, telah ditetapkan Pedoman Umum Reformasi Birokrasi yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Negara PAN Nomor PER/15/M.PAN/7/2008, yang disertai dengan juklak/juknis sebagai landasan teknis operasional pelaksanaan reformasi birokrasi instansi, dan kemudian terakhir dilengkapi dengan Peraturan Menteri Negara PAN No. PER/4/M.PAN/4/2009 tentang Pedoman Pengajuan Usulan Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemda. Dengan berbagai kebijakan nasional tersebut, pada dasarnya setiap kementerian/lembaga dan Pemda dapat melakukan reformasi birokrasi di instansinya masing-masing, yang pada dasarnya terfokus pada penataan organisasi, penataan proses bisnis, dan penataan sumberdaya manusia.

8.2 Permasalahan dan Sasaran Pembangunan

8.2.1 Permasalahan

Efektivitas Peraturan Perundang-undangan. Upaya untuk melakukan efektivitas peraturan perundang-undangan sampai dengan saat ini masih terkendala dengan masih adanya peraturan perundang-undangan yang ada tumpang tindih, inkonsisten, tidak jelas, multitafsir dan pertentangan antara peraturan perundang-undangan yang satu dengan yang lain, baik yang sederajat maupun antara peraturan yang lebih tinggi dengan peraturan di bawahnya, dan antara peraturan tingkat pusat dan daerah. Rendahnya kualitas peraturan perundang-undangan disebabkan oleh antara lain masih rendahnya kualitas sumber daya manusia, ego sektoral yang tinggi dan dukungan sarana dan prasarana yang belum memadai. Pelibatan masyarakat sebagai pihak yang menerima dampak dari suatu kebijakan dalam bentuk peraturan perundang-

undangan, juga belum sepenuhnya dilakukan sehingga akses untuk menyalurkan aspirasinya secara partisipatif dalam penentuan arah kebijakan prioritas penyusunan peraturan perundang-undangan masih dirasakan minim. Di samping itu, akses dan mekanisme kontrol terhadap masukan-masukan masyarakat kepada lembaga legislatif juga belum dilakukan secara optimal, proses penyusunan peraturan perundang-undangan yang belum dilaksanakan secara partisipatif akan berimplikasi pada kesenjangan substansi peraturan perundang-undangan dengan kebutuhan masyarakat untuk memperoleh keadilan.

Kinerja Lembaga di Bidang Hukum. Permasalahan dalam kerangka peningkatan penegakan hukum antara lain adalah rendahnya kapasitas sumber daya manusia yang berupa kapasitas dan profesionalisme yang masih belum akuntabel. Pengembangan SDM pada lembaga di bidang hukum, belum didukung oleh sistem rekrutmen, promosi, dan mutasi yang memadai sehingga berpengaruh terhadap kinerja lembaga peradilan secara keseluruhan. Masalah lainnya, adalah lemahnya manajemen institusi dalam penegakan hukum. Para penegak hukum kurang mampu menciptakan sebuah mekanisme transparansi yang efektif, yang dapat dilihat dari belum optimalnya dan masih lemahnya proses audit dan pengawasan internal. Oleh sebab itu, pemanfaatan kemajuan teknologi seperti *e-Government* untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas belum dapat dilaksanakan secara optimal. Dari sudut pandang akuntabilitas publik, masalah ini dikhawatirkan akan berdampak pada menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, yang pada akhirnya akan berakibat negatif terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan negara secara umum.

Penegakan hukum yang konsisten dengan tetap memperhatikan hak-hak asasi manusia dan menghindari adanya diskriminasi merupakan salah satu syarat untuk dapat menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang baik. Proses penegakan hukum harus didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berintegritas tinggi. Penerapan *reward and punishment* bagi aparat penegak hukum diharapkan dapat mendorong adanya peningkatan kinerja dari aparat penegak hukum masing-masing yang pada akhirnya meningkatkan kinerja. Tidak hanya itu, dukungan sarana dan prasarana yang memadai termasuk dukungan biaya operasional dalam menunjang tugas pokok dan fungsinya masing-masing masih perlu ditingkatkan. Permasalahan di atas antara lain menjadi penyebab masih banyaknya penyelewengan dan penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari. Penerapan *reward and punishment* tersebut tidak langsung dapat menjamin meningkatnya integritas para penegak hukum. Hal tersebut perlu disertai dengan upaya pengawasan internal dan eksternal terhadap kinerja dan perilaku aparat penegak hukum secara menyeluruh.

Di samping permasalahan yang terkait dengan penegakan hukum, kinerja lembaga hukum juga sangat terkait dengan kualitas pelayanan hukum yang diberikan kepada masyarakat meliputi pelayanan keimigrasian, pelayanan pendaftaran badan



hukum, pelayanan pemberian dan pendaftaran hak kekayaan intelektual. Masih rendahnya kualitas pelayanan hukum yang diberikan kepada masyarakat menjadi salah satu penyebab masih rendahnya penilaian yang diperoleh dari survey integritas yang dilaksanakan oleh KPK.

Penghormatan, Pemajuan, dan Penegakan Hak Asasi Manusia.

Perkembangan pemenuhan, perlindungan, pemajuan dan penegakan HAM, belum secara optimal dilaksanakan. Keadaan ini antara lain ditunjukkan bahwa peraturan perundang-undangan nasional mengenai HAM belum sepenuhnya sejalan dengan kovenan dan konvensi yang telah diratifikasi Indonesia sehingga menyebabkan masih berlanjutnya pelanggaran HAM, terutama dalam pemenuhan hak-hak sosial, ekonomi, budaya dan politik. Keadaan ini ditunjukkan dengan masih adanya tindak kekerasan, diskriminasi, dan penyalahgunaan kekuasaan.

Meskipun Pemerintah Indonesia telah meratifikasi kovenan internasional dan prinsip-prinsip perlindungan HAM telah diakomodasi dalam mekanisme penyusunan peraturan perundang-undangan, pada praktiknya masih banyak ditemukan peraturan perundang-undangan nasional dan daerah yang masih tidak sesuai dengan prinsip-prinsip HAM. Hal ini mencerminkan masih adanya kekurangpahaman dari pembuat undang-undang.

Di samping itu, prinsip-prinsip HAM belum dipahami secara komprehensif oleh kementerian/lembaga terkait dalam rangka implementasi kebijakan pemerintah. Meskipun kegiatan-kegiatan kementerian/lembaga sesuai dengan tupoksinya masing-masing telah berupaya untuk menyesuaikan dengan prinsip-prinsip HAM, namun belum adanya pedoman dan standarisasi mengenai pemenuhan, perlindungan dan pemajuan HAM mengakibatkan kegiatan-kegiatan tersebut tidak dapat terlihat pencapaian HAM.

Untuk menjamin pelaksanaan prinsip-prinsip HAM di daerah, telah dibentuk Panitia RAN-HAM daerah. Namun, pelaksanaan tugas dari panitia RAN-HAM di daerah belum optimal karena masih rendahnya pemahaman HAM di kalangan Pemerintah.

Di samping itu pelaksanaan penyelidikan pelanggaran HAM termasuk pelanggaran HAM, belum secara optimal dilakukan dan ditindaklanjuti dalam proses peradilan yang menjunjung rasa keadilan masyarakat, sehingga masih terdapat perkara-perkara pelanggaran HAM yang belum diselesaikan.

Dalam rangka pemenuhan HAM khususnya dalam pemberian akses hukum, pemerintah mempunyai peranan penting terutama dalam pemenuhan hak setiap orang atas bantuan hukum. Namun, upaya pemerintah untuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat miskin dan terpinggirkan belum optimal dan tepat sasaran termasuk perlindungan hukum bagi para pekerja migran. Sejalan dengan hal tersebut penanganan perkara kekerasan dalam rumah tangga juga belum dilakukan secara optimal. Di sisi lain, permasalahan yang mengemuka adalah perlunya penanganan dan

perlindungan kepada masyarakat miskin dan terpinggirkan untuk sengketa tanah dan lingkungan karena seringkali kelompok masyarakat ini tidak dapat memperoleh hak serta akses untuk mendapatkan manfaat dari tanah dan sumber daya alam yang ada karena ketiadaan mekanisme penyelesaian konflik tanah dan sumber daya alam yang mampu melindungi hak-hak masyarakat miskin dan terpinggirkan.

Penyelesaian konflik vertikal dan horisontal yang mengakibatkan pelanggaran HAM, seringkali ditempuh melalui jalur pengadilan. Namun, cara ini dirasakan kurang efektif dan kurang memberikan penyelesaian yang mengakar bagi para pencari keadilan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti tidak seimbanginya kedudukan para pihak yang bersengketa dalam masyarakat, proses peradilan yang lama dan relatif mahal, serta tidak adanya pendekatan kultural dalam penyelesaian melalui pengadilan.

Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN. Upaya pemberantasan korupsi telah banyak dilakukan dan hasilnya pun telah mulai dirasakan. Namun, masih banyak hal yang harus diselesaikan lebih lanjut. Sebagai contoh, IPK Indonesia telah membaik dari tahun ke tahun, tetapi nilainya masih rendah (2,8 dari 10). Di samping itu, skor tersebut juga masih relatif rendah jika dibandingkan dengan negara-negara Asia Tenggara lainnya (lihat Tabel 8.4). Di samping itu, akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, meskipun semakin menunjukkan kemajuan dari tahun ke tahun, kualitasnya masih perlu banyak pembenahan termasuk dalam penyajian laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah (SAP). Opini BPK atas laporan keuangan pemerintah pusat hingga saat ini masih *disclaimer*, demikian pula sebagian besar opini LK pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota.

TABEL 8.4
SKOR IPK NEGARA-NEGARA DI ASEAN (2004--2009)

NO	NEGARA	Nilai Negara-negara Anggota ASEAN					
		2004	2005	2006	2007	2008	2009
1	Singapore	9.3	9.4	9.4	9.3	9.2	9.2
2	Brunei Darussalam	-	-	-	-	-	5.5
3	Malaysia	5.0	5.1	5.0	5.1	5.1	4.5
4	Thailand	3.6	3.8	3.6	3.3	3.5	3.4
5	Indonesia	2.0	2.2	2.4	2.3	2.6	2.8
6	Vietnam	2.6	2.6	2.6	2.6	2.7	2.7
7	Philipines	2.6	2.5	2.5	2.5	2.3	2.4
8	Cambodia	-	2.3	2.1	2.0	1.8	2.0
9	Laos	-	3.3	2.6	1.9	2.0	2.0
10	Myanmar	1.7	1.8	1.9	1.4	1.3	1.4

Sumber: *Transparency International* (diolah).

Oleh karena itu, upaya penegakan hukum terhadap perkara korupsi masih menjadi prioritas dalam pemberantasan korupsi. Masih banyak perkara korupsi yang belum terselesaikan, antara lain yang menjadi perhatian masyarakat baik di dalam maupun luar negeri dan menuntut penyelesaian sesuai dengan keadilan yang berlaku. Penegakan hukum yang konsisten dengan hukum positif yang berlaku berdampak pada tingkat kepercayaan masyarakat terhadap hukum dan aparaturnya. Persepsi masyarakat yang buruk mengenai proses penegakan hukum terutama pada perkara-perkara korupsi, dapat menggiring masyarakat pada pola kehidupan sosial yang tidak mempercayai hukum sebagai sarana penyelesaian konflik, dan cenderung menyelesaikan konflik di luar jalur proses hukum. Untuk itu, perlu dilakukan upaya percepatan penyelesaian perkara-perkara korupsi yang menarik perhatian masyarakat. Pelaksanaan amanat UU No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi memerlukan kesiapan infrastruktur yang maksimal untuk menyelenggarakan pengadilan tindak pidana korupsi, perlu dilakukan dalam kurun waktu dua tahun ke depan di tiap ibu kota provinsi di seluruh Indonesia. Dengan demikian, infrastruktur tersebut diharapkan dapat mendukung upaya penegakan hukum terutama dalam upaya pemberantasan korupsi.

Upaya penegakan hukum juga tidak terlepas dari terjadinya tumpang tindih peraturan perundang-undangan antara pusat dan daerah, antara daerah satu dengan lainnya serta antara peraturan perundang-undangan secara horisontal satu dengan lainnya. Akibatnya, penegakan hukum belum sesuai dengan harapan masyarakat. Lemahnya pengawasan yang dilakukan baik internal maupun eksternal kepada lembaga penegak hukum, aparat penegak hukum maupun unsur-unsur profesi lain yang terkait dengan penegakan hukum juga semakin memperburuk kondisi yang ada. Upaya penegakan hukum perlu didukung oleh peraturan perundang-undangan yang memadai untuk menjamin berjalannya proses penegakan hukum yang memenuhi rasa keadilan masyarakat, disamping upaya menyelamatkan aset Negara yang hasil tindak pidana korupsi. Keikutsertaan Indonesia dalam Konvensi PBB Anti Korupsi 2003 juga masih menghadapi berbagai kendala, terutama menyesuaikan peraturan perundang-undangan nasional yang sejalan dengan masih minimnya pengaturan dalam Konvensi tersebut, mempersiapkan perangkat kelembagaan yang dipersyaratkan oleh Konvensi agar lebih memudahkan Pemerintah memindahkan pelaku dan sekaligus mengambil aset hasil korupsi yang dibawa ke luar negeri.

Permasalahan lain, terkait dengan upaya penegakan hukum adalah belum optimalnya pemberian perlindungan untuk saksi dan pelapor tindak pidana korupsi. Masih terdapat kekhawatiran yang cukup tinggi akan adanya teror, ancaman, bahkan sampai dengan upaya pembunuhan terhadap pihak-pihak yang melaporkan atau menjadi saksi terjadinya tindak pidana korupsi. Di samping itu, mekanisme pengaduan masyarakat belum secara sistematis terbangun, padahal mekanisme ini dapat lebih banyak memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat.

Berbagai upaya pemberantasan korupsi telah dilakukan oleh Pemerintah baik berupa langkah penindakan maupun pencegahan. Namun, berbagai langkah penindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum ternyata belum mampu secara sistematis mengurangi praktik dan perilaku koruptif. Lebih memprihatinkan lagi justru cukup banyak aparat penegak hukum yang terlibat dalam praktik koruptif mafia hukum, dan peradilan serta makelar perkara. Dengan demikian, upaya represif masih menjadi prioritas utama dalam rangka memberikan efek jera terhadap para pelaku tindak pidana korupsi. Langkah preventif juga terus dilakukan secara simultan dan berkesinambungan, yang diharapkan akan membawa dampak perbaikan, khususnya manajemen pembangunan hukum di masa yang akan datang. Salah satu permasalahan utama yang menjadi hambatan untuk melakukan langkah-langkah pencegahan korupsi, terkait erat dengan belum tuntasnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi, belum tuntas dan terintegrasinya program *Single Identification Number* (SIN), dan belum tuntasnya reformasi manajemen keuangan negara, terutama reformasi perencanaan dan penganggaran pembangunan.

Sampai dengan saat ini upaya pencegahan belum dilaksanakan secara integratif oleh aparat publik sebagai penyedia pelayanan umum, bersama-sama dengan sektor swasta dan masyarakat sebagai sarana untuk mencapai optimalisasi upaya



pemberantasan korupsi. Upaya pencegahan KKN juga masih terkendala oleh belum optimalnya kapasitas pengelolaan manajemen keuangan negara dan pengawasannya. Penyebabnya antara lain oleh keterbatasan jumlah dan kualitas pengelola keuangan dan auditor pemerintah. Permasalahan lain di bidang pengawasan adalah bahwa masih terdapat ketidakselarasan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan, belum sempurnanya mekanisme/hubungan kerja yang mengatur pengawasan yang dilakukan legislatif dan peran Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) dalam penanganan pengaduan masyarakat, dan perlunya diperkuat kode etik/standar audit. Independensi pengawas internal dalam melakukan pengawasan juga masih sering mendapatkan kritik dari masyarakat. Di samping itu, tindak lanjut hasil pengawasan internal, baik sebagai upaya perbaikan kinerja maupun upaya penegakan hukum, pada umumnya masih sangat rendah. Dari survei tahun 2006, hanya 17,83% dari jumlah Pemda di Indonesia yang melakukan investigasi lanjutan, dan hanya 9,02% Pemda yang menindaklanjuti hasil laporan audit dengan melaporkan ke pihak kepolisian. Akibatnya, tujuan pengawasan dan pemeriksaan untuk mewujudkan akuntabilitas publik dan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih sering kurang dapat dicapai karena laporan itu tidak ditindaklanjuti dengan upaya perbaikan atas kelemahan dan temuan pengawasan dan pemeriksaan.

Di samping permasalahan tersebut di atas, budaya kerja produktif juga belum berkembang secara maksimal di lingkungan birokrasi. Pelaksanaan kode etik bagi aparat birokrasi publik (*code of conduct*) masih kabur sehingga belum mampu menciptakan adanya budaya birokrasi yang sehat, seperti kerja keras, keinginan untuk berprestasi, kejujuran, rasa tanggungjawab, serta bersih dan bebas dari KKN. Di samping itu, pengaturan tentang konflik kepentingan di lingkungan birokrasi pemerintah yang dilakukan oleh PNS juga belum memadai. Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, penerapan *e-procurement* belum meluas pada instansi pemerintah baik pusat maupun daerah. Padahal, pengembangan dan penerapan *e-procurement* merupakan instrumen yang efektif untuk mencegah praktik KKN dalam proses pengadaan barang dan jasa publik.

Pelayanan Publik. Meskipun kemajuan telah banyak dicapai dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik, juga disadari bahwa pemerintah belum dapat menyediakan kualitas pelayanan publik sesuai dengan tantangan yang dihadapi, yaitu perkembangan kebutuhan masyarakat yang semakin maju dan persaingan global yang semakin ketat. Hasil survei integritas yang dilakukan KPK menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik Indonesia baru mencapai skor 6,84 dari skala 10 untuk instansi pusat, dan 6,69 untuk unit pelayanan publik di daerah. Skor integritas menunjukkan karakteristik kualitas dalam pelayanan publik, seperti ada tidaknya suap, ada tidaknya SOP, kesesuaian proses pemberian pelayanan dengan SOP yang ada, keterbukaan informasi, keadilan dan kecepatan dalam pemberian pelayanan serta kemudahan pengaduan masyarakat. Di samping itu, nilai indeks kemudahan berusaha di Indonesia juga menunjukkan bahwa Indonesia belum dapat memberikan pelayanan yang baik bagi

para investor yang berbisnis atau akan berbisnis di Indonesia. *Doing Business Report*, yang diterbitkan IFC menyediakan penilaian yang objektif terhadap regulasi berusaha dari negara-negara yang disurveinya. Selain itu, *Doing Business Report* juga menjadi pedoman untuk mengevaluasi regulasi-regulasi yang secara langsung berdampak pada pertumbuhan ekonomi, membuat perbandingan antarnegara, dan mengidentifikasi reformasi yang telah dilakukan. Secara berurutan peringkat kemudahan berusaha Indonesia adalah 130 pada tahun 2006, 123 pada tahun 2007, 127 pada tahun 2008, 129 pada tahun 2009 dan 122 pada tahun 2010. Meskipun peringkat Indonesia cenderung membaik, jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga, Indonesia masih tertinggal. Sebagai perbandingan dengan negara tetangga, untuk tahun 2010, Singapura peringkat 1, Thailand peringkat 12, Malaysia peringkat 23, Brunei peringkat 96, Vietnam peringkat 93 (Tabel 8.5). Salah satu parameter kemudahan berusaha adalah jumlah hari yang dibutuhkan untuk memulai usaha. Berdasarkan hasil survei tahun 2009, untuk memulai usaha di Indonesia membutuhkan waktu lima kali lebih lama jika dibandingkan dengan Malaysia.

TABEL 8.5
PERINGKAT *DOING BUSINESS* NEGARA-NEGARA ASEAN

NO	NEGARA	PERINGKAT NEGARA ANGGOTA ASEAN				
		2006	2007	2008	2009	2010
		175 Negara	178 Negara	181 Negara	181 Negara	183 Negara
1	Singapura	1	1	1	1	1
2	Thailand	17	15	19	13	12
3	Malaysia	21	24	25	20	23
4	Vietnam	94	91	87	92	93
5	Brunei	66	79	83	88	96
6	Indonesia	130	123	127	129	122
7	Philipina	135	133	136	140	144
8	Kamboja	146	145	150	135	145
9	Laos	147	159	164	165	167

Sumber: *International Finance Corporation* (diolah)

Sebagai akibat masih lemahnya kapasitas manajemen pelayanan publik, berbagai pengurusan jenis perizinan yang seharusnya menjadi daya saing dalam menarik investasi menjadi sering terhambat. Ini terbukti dari lamanya rata-rata waktu perizinan

yang diperlukan. Sebagai catatan, pada tahun 2005 jumlah prosedur yang harus ditempuh untuk mengurus usaha baru adalah sebanyak 12 prosedur, dengan memakan waktu 151 hari, serta membutuhkan biaya melebihi rata-rata pendapatan per kapita penduduk Indonesia (1,3 kali lebih tinggi dari pada pendapatan per kapita). Lama waktu pengurusan membaik menjadi 97 hari pada tahun 2007, tetapi memburuk lagi menjadi 105 hari pada 2008. Pada tahun 2009, jumlah prosedur yang ditempuh menjadi 11 prosedur dengan lama pengurusan 76 hari (lihat Tabel 8.6).

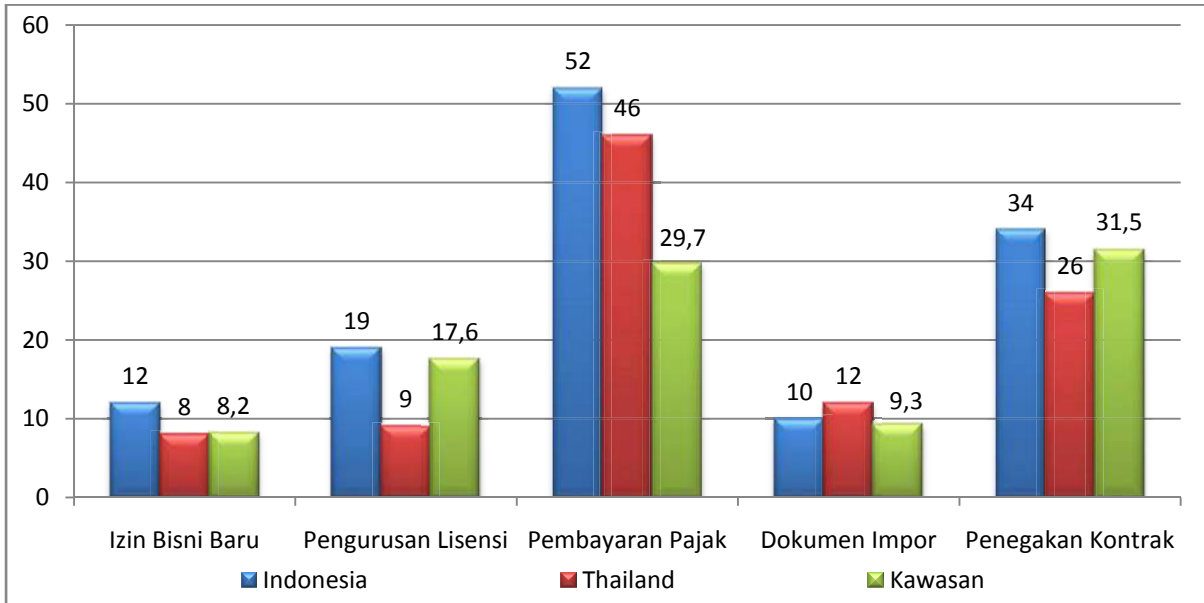
TABEL 8.6
PERBANDINGAN JUMLAH HARI YANG DIBUTUHKAN UNTUK MEMULAI USAHA
(STARTING A BUSINESS)

NO	NEGARA	TAHUN				
		2005	2006	2007	2008	2009
1	Singapore	8	6	6	5	4
2	Thailand	33	33	33	33	8
3	Malaysia	30	30	30	24	13
4	Philippines	50	48	48	58	15
5	Vietnam	56	50	50	50	50
7	Indonesia	151	151	97	105	76
8	Cambodia	94	86	86	86	85
9	Laos	198	198	192	103	103

Sumber: *International Finance Corporation* (diolah)

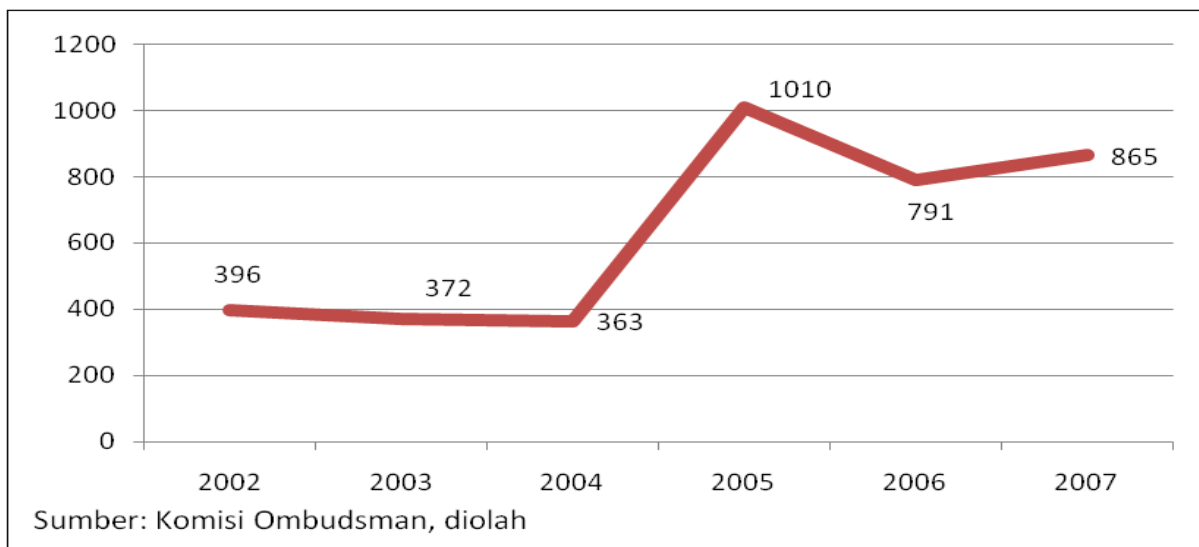
Sebagai ilustrasi lemahnya kinerja aparatur negara di bidang pelayanan terhadap dunia usaha ini, apabila dibandingkan dengan negara tetangga seperti Thailand dan dengan rata-rata untuk negara di kawasan Asia Tenggara, ternyata Indonesia masih tertinggal. Indonesia mempunyai rantai birokrasi yang lebih panjang, waktu yang lebih lama, dan biaya yang lebih mahal untuk pengurusan izin bisnis baru, lisensi, pembayaran pajak, dan penegakan kontrak jika dibandingkan dengan Thailand dan Malaysia. Beberapa parameter yang digambarkan di atas memperlihatkan bahwa posisi Indonesia belum menggembirakan jika dibandingkan dengan negara tetangga. Hal ini tentunya sangat berpengaruh terhadap daya saing Indonesia di dunia internasional (lihat Grafik 8.5).

GRAFIK 8.5
PERBANDINGAN PERIJINAN USAHA DI INDONESIA, THAILAND, DAN RATA-RATA REGIONAL TAHUN 2008



Sumber: Bank Dunia, diolah

GRAFIK 8.6
JUMLAH KELUHAN PELAYANAN PUBLIK



Sumber: Komisi Ombudsman, diolah



Masih rendahnya kualitas pelayanan publik tersebut disebabkan oleh beberapa hal. Meskipun mentalitas birokrat telah berubah dari mentalitas penguasa menjadi mentalitas pelayan masyarakat, perubahan itu diyakini belum cukup meluas di kalangan birokrasi. Sebagian besar birokrat kita masih belum menempatkan masyarakat sebagai pemilik kedaulatan yang harus dipenuhi hak-haknya. Selanjutnya, manajemen pelayanan publik masih perlu pembenahan. Sebagian besar unit pelayanan publik belum menerapkan standar pelayanan, yang secara jelas dan transparan memberitahukan hak dan kewajiban masyarakat sebagai penerima layanan publik. Di samping itu, sistem manajemen pelayanan publik belum banyak memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk memberikan pelayanan publik yang cepat, murah, transparan, dan akuntabel. Sistem evaluasi kinerja pelayanan publik juga masih lemah dalam mendorong kinerja pelayanan. Hal ini diperburuk dengan belum tersedianya manajemen penanganan keluhan yang efektif (lihat Grafik 8.6). Sebuah studi menunjukkan bahwa selama ini masyarakat lebih mengandalkan media surat kabar (koran) sebagai media yang dinilai masih paling efektif untuk bisa menyampaikan berbagai keluhan, yaitu sebesar (53.8%). Posisi ini diikuti oleh radio (33.91 %) dan pesan singkat (SMS) sebesar 30.65%.

Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi. Meskipun berbagai kebijakan telah banyak dilakukan dan kemajuan pun telah dicapai, kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi masih banyak dikeluhkan. Dari beberapa indikator yang ada, penilaian tersebut mendapatkan pembenaran. Memang Indonesia mengalami kenaikan dari tahun ke tahun dalam penilaian *government effectiveness* yang dilakukan oleh *Bank Dunia*, yaitu berdasarkan indikator tersebut Indonesia memperoleh skor -0,43 pada tahun 2004, -0,37 pada tahun 2006, dan -0,29 pada tahun 2008 (Tabel 8.7). Namun, nilai itu masih terlalu rendah, dan masih tertinggal jika dibandingkan dengan kemajuan yang dicapai oleh negara tetangga. Dalam hal ini, efektivitas pemerintahan di Indonesia masih di bawah efektivitas pemerintahan Malaysia dan Thailand. Kondisi ini mencerminkan masih adanya permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan seperti kualitas birokrasi, pelayanan publik, dan kompetensi aparat pemerintah.

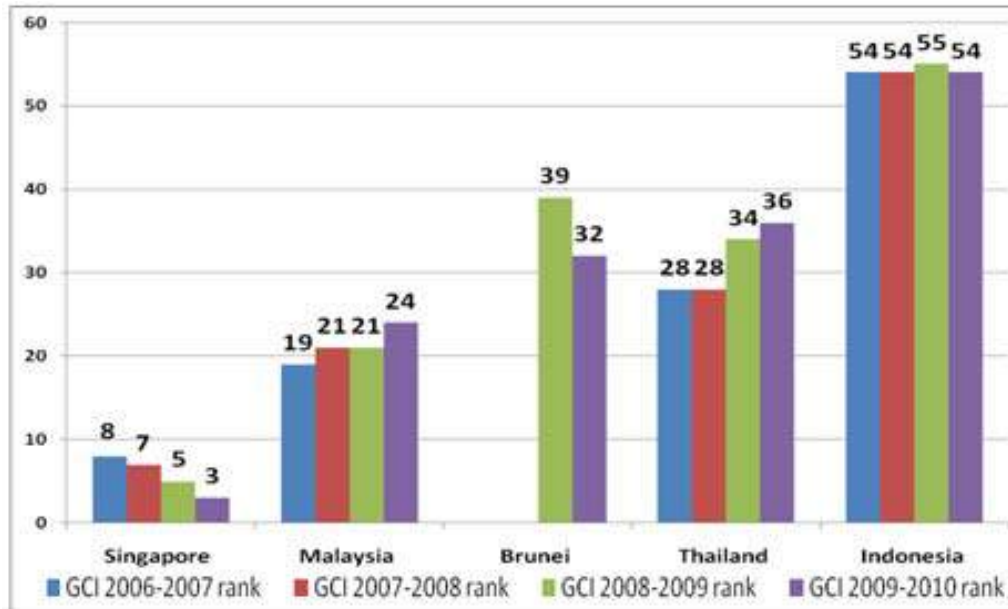
TABEL 8.7
PERBANDINGAN SKOR *GOVERNMENT EFFECTIVENESS*
NEGARA-NEGARA ASEAN

No	Negara	Perkembangan Skor				
		2004	2005	2006	2007	2008
1	Singapore	2.23	2.13	2.29	2.45	2.53
2	Malaysia	0.99	0.99	0.99	1.06	1.13
3	Brunei Darussalam	0.06	0.59	0.77	0.86	0.89
4	Thailand	0.22	0.36	0.25	0.17	0.11
5	Philippines	-0.28	-0.11	-0.09	-0.04	0.00
6	Indonesia	-0.43	-0.46	-0.37	-0.39	-0.29
7	Vietnam	-0.50	-0.30	-0.34	-0.35	-0.31
8	Cambodia	-0.89	-0.92	-0.90	-0.86	-0.81
9	Laos	-0.92	-1.01	-0.79	-0.87	-0.84

Sumber: *Governance Matters VIII; Aggregate and Individual Governance Indicators 1996--2008*, Daniel, Kaufmann. Aart Kraay, Massimo Mastruzzi

Selanjutnya, indeks daya saing global (*global competitiveness index*) yang dipublikasikan oleh *World Economic Forum* tahun 2008, juga memperlihatkan posisi Indonesia di bawah Malaysia dan Thailand. Posisi Indonesia masih menduduki peringkat 54 pada tahun 2006--2007 dan 2007--2008, sedangkan pada tahun 2008--2009 Indonesia menduduki peringkat 55 dengan skor 4,3 (lihat Grafik 8.7).

GRAFIK 8.7
PERBANDINGAN PERINGKAT *GLOBAL COMPETITIVENESS INDEX* INDONESIA
DENGAN NEGARA-NEGARA ASEAN



Sumber: *The World Bank 2009* (diolah)

Permasalahan tersebut di atas timbul antara lain disebabkan oleh belum optimalnya penataan kelembagaan instansi pemerintah. Akibatnya, terjadi tumpang tindih kewenangan, dan rumusan tupoksi yang kurang jelas sehingga menghambat terjadinya koordinasi dan sinergi dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan. Pada akhirnya, hubungan kelembagaan antar unit kerja dan antarinstansi menjadi tidak produktif. Di samping itu, keberadaan lembaga non struktural yang semakin banyak jumlahnya, seperti komisi, dewan, dan lainnya semakin menambah kerumitan dalam pengaturan kelembagaan, terutama dilihat dari sisi konflik kewenangan, dan beban anggaran negara yang makin besar.

Permasalahan lainnya adalah bahwa bisnis proses yang ada di dalam birokrasi banyak yang belum efisien dan belum akuntabel. Proses kerja di dalam birokrasi juga belum ditunjang dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Hasil pemeringkatan *e-Government Readiness* yang dilakukan oleh PBB menempatkan Indonesia di bawah negara-negara utama lain di kawasan Asia Tenggara. Kondisi ini tentunya juga berpengaruh pada peringkat *e-government readiness* di tingkat global. Di antara negara-negara Asia Tenggara, Indonesia pada tahun 2008 menempati posisi ketujuh di bawah Brunei Darussalam dan Vietnam, sedangkan untuk tataran global, posisi Indonesia juga tidak mengalami peningkatan. Pada tahun 2004 Indonesia berada pada posisi ke 85, tahun 2005 menempati ranking 96, kemudian pada tahun 2008

peringkat Indonesia turun menjadi 106.

Sementara itu, secara umum kualitas SDM aparatur belum dapat menunjang kinerja birokrasi yang efektif dan efisien. Hal ini disebabkan oleh praktik manajemen kepegawaian yang belum sepenuhnya menerapkan sistem merit, mulai dari pengadaan pegawai, promosi dan mutasi, diklat, penilaian kinerja, hingga sistem penggajian dan pensiun. Pelaksanaan sistem pilkada langsung tampaknya memperburuk situasi. Hasil survei di sembilan daerah yang dilakukan UGM pada tahun 2008 menunjukkan bahwa banyak pejabat birokrasi yang kariernya ditentukan bukan oleh profesionalisme dan prestasi kerjanya, melainkan oleh kedekatan hubungannya dengan tokoh-tokoh politik di daerah.

Penataan SDM aparatur menjadi lebih kompleks oleh adanya banyak otoritas dalam pemerintahan yang mengurus bidang kepegawaian. Dalam pemerintahan tingkat pusat terdapat tiga otoritas kepegawaian, yakni Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, Badan Kepegawaian Negara, dan Lembaga Administrasi Negara, di samping biro kepegawaian pada lembaga dan komisi negara, departemen dan lembaga pemerintah nondepartemen. Pada pemerintahan daerah, bidang kepegawaian merupakan urusan dari badan kepegawaian daerah dan biro kepegawaian departemen dalam negeri.

Belum optimalnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi juga belum optimal, antara lain juga disebabkan oleh belum mantapnya pelaksanaan sistem perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja. Misalnya, saat ini masih sulit untuk memastikan bahwa terdapat hubungan yang lebih jelas antara tujuan, sasaran, program, dan kegiatan instansi pemerintah dengan anggaran yang dikeluarkan. Permasalahan lainnya, program dan kegiatan di lingkungan instansi pemerintah pada umumnya belum sepenuhnya disertai dengan indikator kinerja yang jelas sehingga sulit diukur pencapaian dan akuntabilitas kinerjanya. Di samping itu, secara umum sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah masih belum berjalan dengan baik, mulai dari proses perencanaan, penganggaran, penilaian kinerja, manajemen kinerja, hingga sistem sanksi dan penghargaan bagi kinerja instansi pemerintah.

8.2.2. Sasaran

Berdasarkan permasalahan di atas dan agar kinerja bidang hukum dan aparatur dapat berkontribusi secara positif bagi pencapaian sasaran dan agenda pembangunan nasional, sasaran pembangunan bidang hukum dan aparatur adalah terwujudnya peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik yang mencerminkan supremasi hukum dan penegakan hak asasi manusia dan didukung oleh aparatur negara yang bersih, berwibawa, bertanggung jawab serta profesional, yang ditandai oleh hal-hal berikut:

1. meningkatnya kepastian hukum melalui tertib peraturan perundang-undangan dengan indikator berkurangnya jumlah peraturan perundang-undangan yang bermasalah, meningkatnya kualitas peraturan perundang-undangan sesuai

dengan kebutuhan pembangunan dan aspirasi masyarakat, dalam rangka mewujudkan Indonesia yang sejahtera, demokratis, dan berkeadilan.

2. meningkatnya kinerja lembaga di bidang hukum yang bersih dan berwibawa, yang ditandai dengan diterapkannya sistem peradilan, pelayanan dan bantuan hukum yang sederhana, cepat, transparan, dan akuntabel.
3. terwujudnya pemenuhan, perlindungan, pemajuan dan penegakan HAM, melalui pemberdayaan Panitia RAN HAM Nasional pada seluruh Kementerian/Lembaga, Panitia RAN HAM Daerah pada seluruh provinsi/kabupaten/kota, dan kualitas regulasi yang berperspektif HAM, terbentuk dan terlaksananya pedoman dan mekanisme pemajuan HAM, jumlah penanganan perkara-perkara HAM, termasuk perlindungan dan bantuan hukum bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
4. terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, yang ditandai oleh hal-hal berikut:

Sasaran	Status Awal	Tahun 2014
Meningkatnya Indeks Persepsi Korupsi	2,8 (tahun 2009)	5,0
Terlaksananya Rencana Aksi Daerah (RAD) Pemberantasan Korupsi di provinsi/kabupaten/kota	72,7% (provinsi 2009)	100%
Meningkatnya opini BPK atas Laporan Keuangan Kementerian/Lemabaga (LKK) dengan status Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	42,17% (IHPS I 2009)	100%
Meningkatnya opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dengan status Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	2,73% (IHPS I 2009)	60%

5. terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada penduduk dan masyarakat, yang ditandai oleh hal-hal berikut:

Sasaran	Status Awal	Tahun 2014
Meningkatnya skor Integritas Pelayanan Publik pada unit layanan di instansi pusat	6,64 (tahun 2009)	8

Sasaran	Status Awal	Tahun 2014
Meningkatnya skor Integritas Pelayanan Publik pada unit layanan di instansi daerah	6,46 (tahun 2009)	8
Meningkatnya Peringkat Kemudahan Berusaha.	122 (tahun 2009)	75

6. meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi yang ditandai oleh hal-hal berikut:

Sasaran	Status Awal	Tahun 2014
Meningkatnya skor Indeks Efektivitas Pemerintahan	- 0,29 (tahun 2008)	0,5 (skala -2,5 sd 2,5)
Instansi pemerintah yang akuntabel	24% (tahun 2009)	80%

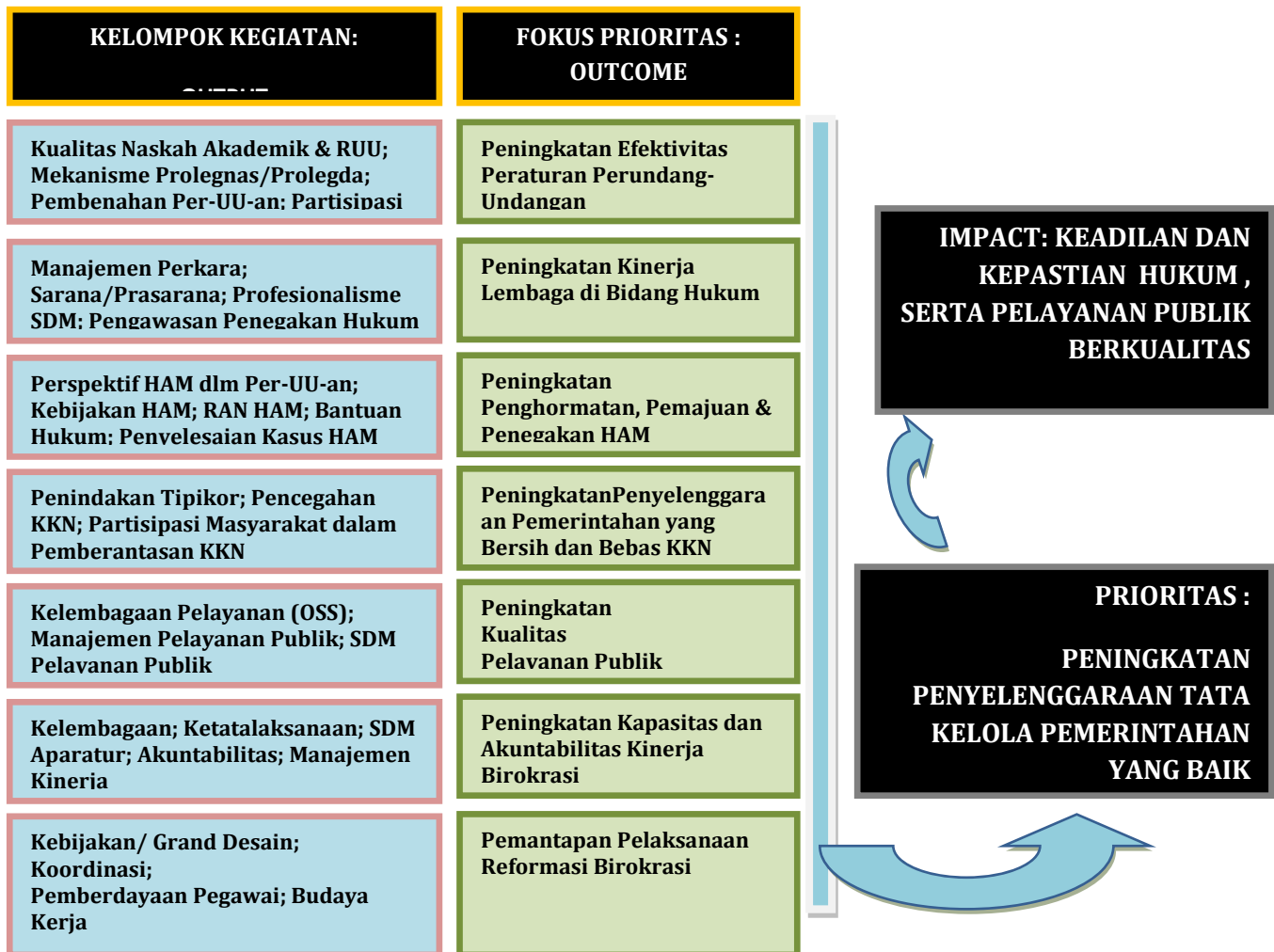
8.3 Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan

Dalam rangka mendukung terwujudnya Indonesia yang sejahtera, demokratis dan berkeadilan, kebijakan pembangunan di bidang hukum dan aparatur diarahkan pada perbaikan tata kelola pemerintahan yang baik, dengan strategi sebagai berikut:

1. peningkatan efektivitas peraturan perundang-undangan;
2. peningkatan kinerja lembaga di bidang hukum;
3. peningkatan penghormatan, pemajuan, dan penegakan HAM;
4. peningkatan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN);
5. peningkatan kualitas pelayanan publik;
6. peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi;
7. pemantapan pelaksanaan reformasi birokrasi.

Hal tersebut di atas dapat digambarkan dalam kerangka pikir sebagai berikut:

GAMBAR 8.1.
KERANGKA PIKIR PEMBANGUNAN BIDANG HUKUM DAN APARATUR



Dengan berpijak pada kerangka pikir di atas, untuk mencapai sasaran prioritas peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik akan ditempuh melalui strategi kebijakan sebagai berikut:

8.3.1 Peningkatan Efektivitas Peraturan Perundang-Undangan

Upaya untuk menciptakan efektivitas peraturan perundang-undangan nasional dilaksanakan melalui hal-hal berikut:

1. **Peningkatan kualitas substansi peraturan perundang-undangan**, dilakukan antara lain melalui dukungan penelitian/pengkajian Naskah Akademik. Hasil pengkajian/penelitian tersebut akan menjadi bahan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan yang akan diharmonisasikan dan disinkronisasikan dengan peraturan perundang-undangan yang sudah ada.
2. **Penyempurnaan proses pembentukan peraturan perundang-undangan**, dilakukan mulai dari tahapan perencanaan, persiapan, teknik penyusunan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan, dan penyebarluasan. Untuk menjamin tidak adanya kesenjangan substansi dengan kebutuhan masyarakat, peran masyarakat dalam setiap tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan, perlu diperkuat. Hal ini juga perlu didukung oleh mekanisme pelaksanaan Program Legislasi Nasional dan Daerah yang mengikat bagi eksekutif dan legislatif serta menjadi wadah menyelaraskan kebutuhan kerangka regulasi yang mendukung prioritas pembangunan nasional.
3. **Pelaksanaan harmonisasi peraturan perundang-undangan**, dilakukan melalui kegiatan harmonisasi peraturan perundang-undangan.

8.3.2 Peningkatan Kinerja Lembaga di Bidang Hukum

Untuk mencapai kinerja lembaga penegak hukum yang diharapkan, akan dilaksanakan langkah-langkah antara lain sebagai berikut:

1. **Upaya peningkatan sistem manajemen perkara yang akuntabel dan transparan**, agar masyarakat pencari keadilan dapat memperoleh akses yang memadai pada lembaga pengadilan dan mendapatkan kepastian hukum. Hal ini dapat diukur dari rendahnya angka penyelesaian perkara, proses peradilan yang cepat, sederhana, transparan dan akuntabel, serta adanya perlindungan terhadap hak-hak pihak yang terlibat dalam proses peradilan.
2. **Pelaksanaan akuntabilitas penegakan hukum**, yang perlu didukung oleh profesionalisme aparat penegak hukum yang terdiri atas Hakim, Jaksa, Polisi, Advokat dan petugas masyarakatan. Hal tersebut terkait dengan kemampuan aparat penegak hukum untuk menangani perkara-perkara yang kompleksitasnya semakin tinggi. Di samping itu peningkatan profesionalisme aparat penegak hukum dimaksudkan juga untuk meningkatkan integritas aparat penegak hukum.
3. **Perbaikan mekanisme seleksi, promosi, dan mutasi aparat penegak hukum yang bebas KKN, dan sesuai dengan kompetensi**, dapat dilakukan melalui perbaikan sistem karier aparat penegak hukum yang berpengaruh kepada kinerja lembaga penegak hukum secara keseluruhan.
4. **Perbaikan pelayanan hukum yang lebih baik dan berkualitas**, dalam rangka mendorong pelaksanaan penegakan hukum yang lebih baik.

5. **Peningkatan pengawasan eksternal dan internal dari upaya penegakan hukum**, diperlukan untuk menjamin berjalannya proses penegakan hukum yang akuntabel, dan memenuhi rasa keadilan masyarakat.
6. **Peningkatan dukungan sarana dan prasarana**, untuk mendukung upaya meningkatkan kinerja lembaga penegak hukum.

8.3.3 Peningkatan Penghormatan, Pemajuan dan Penegakan HAM

Penghormatan terhadap prinsip-prinsip hak asasi manusia akan dilaksanakan dalam kerangka pembangunan hukum melalui hal-hal berikut:

1. **Pembaruan materi hukum**, yang dilaksanakan dengan tetap memperhatikan upaya perlindungan melalui pengakuan dan penerapan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan berkeadilan gender ke dalam semua bentuk pelayanan kepada seluruh lapisan masyarakat tanpa diskriminasi. Untuk mendukung pelaksanaan penegakan hukum perlu pula memperhatikan kepastian dan perlindungan hak asasi manusia. Peningkatan Pemberdayaan Hak Asasi Manusia dilakukan melalui perwujudan keadilan rakyat yang dapat dilakukan dalam berbagai dimensi, yaitu ekonomi, sosial, budaya, politik, keamanan, dan hukum yang sangat bergantung satu sama lain. Diharapkan melalui integrasi pendekatan hak asasi manusia ke dalam berbagai perencanaan kebijakan dan kegiatan di berbagai bidang pembangunan dapat memberikan manfaat dan hasil guna bagi pemajuan dan pemenuhan hak asasi manusia untuk lima tahun mendatang.
2. **Peningkatan pemberian bantuan hukum**, merupakan bagian dari tugas dan fungsi pengadilan yang penting untuk ditindaklanjuti dalam rangka meningkatkan pemberdayaan fungsi pengadilan untuk memberikan bantuan hukum bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan. Untuk itu, perbaikan kebijakan dan mekanisme bantuan hukum kepada masyarakat, khususnya masyarakat miskin dan terpinggirkan akan dilakukan agar benar-benar tepat sasaran penggunaannya

8.3.4. Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN

Pemerintahan yang bersih dan bebas KKN merupakan prasyarat utama bagi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik. Tanpa adanya pemerintahan yang bersih akan sulit menjaga sumber daya pembangunan yang berharga. Berkurangnya sumber daya pembangunan ini akan berakibat langsung pada menurunnya kualitas pelayanan publik, yang pada akhirnya berdampak pada hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Melalui perwujudan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, keadilan dan kepentingan masyarakat luas akan terjaga.

Terwujudnya pemerintahan yang bersih juga berfungsi untuk menunjukkan martabat dan integritas bangsa di mata dunia. Melalui pemerintahan yang bersih,

penghargaan dan kepercayaan bangsa lain akan meningkat dan Indonesia akan lebih mudah berperan dalam percaturan kebijakan global.

Untuk mencapai pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, diperlukan langkah-langkah antara lain sebagai berikut:

1. **Penegakan hukum yang kuat dan dipercaya.** Penegakan hukum diperlukan untuk memberikan kepastian dari suatu kebijakan atau aturan dan untuk memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. Penegakan hukum juga diperlukan sebagai alat paksa agar kebijakan dan aturan tersebut dipatuhi dan dilaksanakan. Tanpa adanya penegakan hukum yang tegas, adil, dan tanpa pandang bulu, kepastian hukum akan menurun dan selanjutnya menciptakan permasalahan lain yang sulit untuk diselesaikan. Berbagai upaya antara lain melalui peningkatan kualitas infrastruktur hukum, baik aparatur penegak hukum serta sarana dan prasarana lainnya, penegakan hukum di bidang pemberantasan korupsi diharapkan dapat mendukung pencapaian tujuan terciptanya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN.
2. **Pencegahan KKN melalui penegakan sistem integritas aparatur negara.** Selain upaya penegakan hukum tersebut di atas, diperlukan upaya-upaya pencegahan untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan kewenangan. Upaya pencegahan dimaksudkan agar tindakan penyalahgunaan dapat dikurangi atau bahkan dihilangkan. Tanpa adanya upaya pencegahan, prevalensi penyalahgunaan kewenangan akan terus meluas dan tak dapat ditanggulangi karena terbatasnya kemampuan upaya penegakan hukum untuk melakukan penindakan. Upaya pencegahan ini akan dilakukan antara lain dengan mengembangkan kebijakan dan penegakan sistem integritas aparatur, yang merupakan prasyarat penting untuk menciptakan pemerintah yang bersih dan bebas KKN. Hal ini akan dicapai antara lain melalui pemantapan kebijakan pengawasan; peningkatan efektivitas sistem pengawasan; peningkatan kuantitas dan kualitas internal auditor dan pengelola keuangan negara; pemantapan penerapan sistem pengendalian intern pemerintah melalui penyusunan pedoman dan peningkatan kapasitas auditor, serta pelaksanaan asistensi, konsultasi dan bimbingan teknis bagi instansi pemerintah pusat dan daerah dalam penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah. Kebijakan lain yang akan ditempuh untuk meningkatkan integritas aparatur adalah pengembangan kebijakan dan penerapan disiplin pegawai, netralitas PNS, penerapan kode etik, pakta integritas; dan pembatasan konflik kepentingan. Hal itu harus disertai dengan penerapan mekanisme sanksi dan penghargaan yang ketat bagi seluruh pejabat dan pegawai, dan disertai dengan kebijakan lainnya untuk menginternalisasikan nilai-nilai integritas dan budaya kerja serta profesionalisme di lingkungan PNS. Dengan upaya ini, dan simultan dengan berbagai kebijakan lainnya yang menunjang, diharapkan etos kerja pegawai negeri yang “bersih, kompeten, dan melayani” dapat segera terwujud. Dalam

rangka meminimalkan praktik KKN serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas di lingkungan birokrasi, akan ditempuh pula penerapan TIK dalam penyelenggaraan pemerintahan, termasuk *e-procurement* dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.

3. **Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan.** Hal lain yang perlu dilakukan dalam peningkatan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN adalah adanya partisipasi masyarakat. Masyarakat berperan besar untuk mengawasi dan mengadukan terjadinya malpraktik dan penyalahgunaan kewenangan serta untuk membantu pemerintah dalam upaya-upaya pembenahan untuk mencapai pemerintahan yang bersih. Partisipasi masyarakat merupakan *sine qua non* atau prakondisi dari suatu kehidupan demokrasi yang sehat. Dengan demikian, partisipasi masyarakat yang tinggi menjadi karakteristik penting dari adanya *good governance*.

8.3.5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik akan terus dilakukan secara nyata, melalui berbagai langkah-langkah antara lain sebagai berikut:

1. **Memperkuat manajemen dan sistem pelayanan publik nasional.** Hal ini akan ditempuh dengan menyusun kebijakan operasional agar kebijakan tentang pelayanan publik yang telah ditetapkan dalam UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dapat segera dilaksanakan dengan efektif. Dalam undang-undang itu telah diatur bahwa setiap unit penyelenggara pelayanan harus memiliki standar pelayanan dan maklumat yang mengatur dengan jelas hak dan kewajiban penyelenggara layanan maupun penerima layanan. Di dalamnya juga diatur mekanisme penanganan pengaduan oleh penerima layanan bila yang bersangkutan merasa tidak memperoleh pelayanan sesuai standar pelayanan yang ada. Apabila kebijakan operasional itu dapat segera dikeluarkan dan dilaksanakan, harapan agar pemerintah dapat memberikan pelayanan yang berkualitas secara bertahap dapat segera diwujudkan. Sejalan dengan kebijakan tersebut, untuk meningkatkan kompetensi SDM dan inovasi dalam manajemen pelayanan, akan ditempuh peningkatan kapasitas SDM melalui pendidikan dan pelatihan.
2. **Penerapan standar pelayanan minimal pelayanan publik.** Di samping UU tentang Pelayanan Publik mengamanatkan adanya standar pelayanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik, UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang selanjutnya dijabarkan dalam PP No. 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan SPM, juga mengamanatkan setiap kementerian/lembaga menyusun standar pelayanan minimal untuk urusan yang menjadi tanggungjawabnya. Dalam kaitan ini, hingga saat ini sebagian besar kementerian/lembaga belum menyusun SPM. Untuk itu akan dilakukan fasilitasi

untuk mempercepat proses penyusunan SPM oleh berbagai K/L. Kemudian untuk berbagai urusan yang telah ditetapkan SPM-nya, pemerintah akan memfasilitasi pemerintah daerah dalam penerapannya.

3. **Pengembangan sistem evaluasi kinerja pelayanan publik.** Evaluasi kinerja pelayanan publik sangat diperlukan sebagai upaya meningkatkan kinerja pelayanan publik secara berkelanjutan. Untuk itu diperlukan instrumen yang kredibel untuk mengukur kinerja penyelenggaraan pelayanan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat. Untuk itu akan dikembangkan instrumen penilaian, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik, serta melakukan pengkajian ulang atas kebijakan pelayanan umum untuk penyempurnaan lebih lanjut. Selanjutnya, untuk mendorong pemerintah daerah menerapkan pelayanan terpadu satu pintu, akan didorong proses asistensi dan fasilitasi bagi pemerintah daerah dalam penerapan pelayanan terpadu satu pintu. Selain itu, berbagai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik di atas perlu didukung dengan pembinaan pelaksanaan kebijakan pelayanan publik yang efektif baik bagi instansi pemerintah pusat maupun daerah. Di samping itu, untuk mendorong motivasi dan meningkatkan kinerja pelayanan, penting pula diselenggarakan kompetisi antarunit pelayanan publik dan antarinstansi pemerintah daerah. Hal ini akan mendorong unit penyelenggara pelayanan publik untuk meningkatkan kinerja pelayanannya.

8.3.6. Peningkatan Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Upaya peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja pemerintah akan terus ditingkatkan. Untuk mencapai hal itu, kebijakan yang akan diambil adalah sebagai berikut.

1. **Penataan kelembagaan instansi pemerintah sejalan dengan prinsip *structure follow function*.** Upaya ini meliputi penataan kelembagaan instansi pemerintah agar menjadi lebih proporsional, efektif, dan efisien dengan tugas pokok dan fungsi yang jelas, tidak tumpang tindih antarunit kerja dan antarinstansi. Secara khusus, penataan kelembagaan akan diprioritaskan pada instansi yang menangani pendayagunaan aparatur negara, penguatan keberdayaan UMKM, pengelolaan energi, pemanfaatan sumber daya kelautan, restrukturisasi BUMN, hingga pemanfaatan tanah dan penataan ruang. Di samping lembaga-lembaga yang menangani bidang-bidang tersebut, instansi lainnya secara bertahap akan ditata secara keseluruhan. Langkah-langkah tersebut akan meningkatkan koordinasi, kinerja, efisiensi, serta menajamkan gerak organisasi kementerian guna mendukung pencapaian agenda pembangunan nasional.
2. **Pengembangan sistem ketatalaksanaan untuk mendukung peningkatan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam proses kerja**

pemerintahan. Penataan sistem ketatalaksanaan baik di tingkat instansi maupun sistem ketatalaksanaan yang melibatkan hubungan kerja antarinstansi sangat penting artinya untuk mendukung peningkatan kinerja pemerintah. Sasarannya adalah tersusun dan terimplementasikannya bisnis proses dan prosedur standar yang pendek dan sederhana sehingga meningkatkan efisiensi kerja dan sumber daya. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik (*e-gov* dan *e-services*) juga akan terus ditingkatkan untuk lebih meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam proses kerja. Sejalan dengan kebijakan ini, dalam rangka meningkatkan sistem administrasi perkantoran yang modern, efisien dan akuntabel akan dikeluarkan kebijakan operasional manajemen kearsipan sebagai tindaklanjut terbitnya Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.

- 3. Peningkatan profesionalisme, netralitas dan kesejahteraan SDM aparatur.** Peningkatan kualitas SDM Aparatur Negara diarahkan untuk mewujudkan SDM Aparatur yang profesional, netral, dan sejahtera. Hal itu merupakan faktor penting dalam menunjang peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Untuk itu, dalam rangka mencapai kualitas SDM aparatur, akan terus ditingkatkan penerapan sistem merit dalam penyelenggaraan manajemen kepegawaian. Dalam kaitannya dengan hal itu, akan disusun peraturan perundang-undangan yang mengatur manajemen kepegawaian. Beberapa PP juga akan disempurnakan, untuk menjamin adanya (a) penentuan formasi kebutuhan pegawai secara objektif; (b) sistem rekrutmen yang terbuka, kompetitif, dan berbasis kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan organisasi, (c) sistem promosi dan mutasi yang terbuka dan kompetitif, serta berbasis kompetensi, (c) sistem penilaian kinerja pegawai yang lebih objektif dan berbasis kinerja, (d) penyusunan kebijakan tentang standar kompetensi jabatan untuk mendukung sistem promosi dan mutasi berbasis kompetensi; serta (e) sistem diklat berbasis kompetensi yang serasi dengan sistem promosi dan mutasi yang sehat. Tidak kurang pentingnya adalah penyempurnaan sistem penggajian dan sistem pensiun yang layak, adil, dan berbasis kinerja untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai dan mendorong motivasi, semangat berprestasi, dan integritas pegawai. Untuk menunjang pelaksanaan sistem merit dalam manajemen kepegawaian, akan dilanjutkan upaya pengembangan sistem informasi manajemen kepegawaian nasional untuk menghasilkan data kepegawaian yang lengkap, cepat, dan akurat. Di samping itu, juga akan ditingkatkan pemanfaatan pusat penilaian kompetensi (*assessment center*) untuk menunjang sistem pembinaan karier pegawai negeri berbasis kompetensi. Berbagai bentuk pendidikan dan pelatihan akan terus dikembangkan dan disempurnakan, yang disesuaikan dengan perkembangan tantangan penyelenggaraan pemerintahan dan manajemen birokrasi.

Kebijakan lainnya yang akan ditempuh dalam rangka meningkatkan profesionalisme dan kapasitas SDM aparatur adalah (a) revitalisasi penyelenggaraan diklat aparatur; (b) revitalisasi penyelenggaraan diklat kepemimpinan; serta (c) pengembangan sistem magang pada berbagai institusi berkelas internasional bagi calon pemangku jabatan tinggi pegawai negeri. Pembinaan pegawai negeri, khususnya pada jabatan tinggi, diarahkan pula untuk menjadikan pimpinan pegawai negeri sebagai aset nasional, termasuk sebagai alat pemersatu bangsa. Dalam kaitan ini akan dikembangkan kebijakan yang dapat memfasilitasi terjadinya mobilitas vertikal dan horisontal dalam sistem mutasi dan promosi jabatan pegawai negeri.

4. **Peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.** Dalam rangka mewujudkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi, diperlukan langkah-langkah kebijakan yang terarah, sistematis dan mendukung penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan. Akuntabilitas kinerja merupakan faktor penting sebagai pertanggungjawaban kepada publik atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Hal ini akan dicapai melalui penyusunan peraturan perundang-undangan yang mengatur akuntabilitas kinerja, administrasi pemerintahan, kebijakan kontrak kinerja bagi seluruh pejabat dan pegawai, penerapan manajemen kinerja pada instansi pemerintah, serta penerapan sistem *reward and punishment* bagi kinerja instansi pemerintah.

8.3.7. Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Berbagai kebijakan makro untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, serta kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi perlu dijamin implementasinya di tingkat instansi. Agar proses ini dapat berjalan secara komprehensif, terukur, sistematis dan terencana, pemerintah telah mulai melaksanakan reformasi birokrasi instansi pada beberapa instansi. Dalam rangka pemantapan pelaksanaan reformasi birokrasi pada tingkat instansi, akan ditempuh langkah-langkah antara lain sebagai berikut:

1. **Peningkatan koordinasi pelaksanaan reformasi birokrasi instansi.** Perluasan dan penajaman pelaksanaan reformasi birokrasi instansi, efektivitasnya akan ditentukan oleh proses koordinasi antar berbagai instansi yang terkait. Dalam kaitan ini peranan Kemeng PAN dan RB akan terus diperkuat guna menghasilkan berbagai kebijakan implementasi reformasi birokrasi instansi dan mengkoordinasikan pelaksanaannya. Untuk itu, Kemeng PAN dan RB diharapkan segera menetapkan rencana induk atau grand design dan roadmap reformasi birokrasi, serta penyusunan dan penyempurnaan pedoman/juklak/juknis sebagai pedoman teknis operasional pelaksanaan reformasi birokrasi instansi. Di samping itu, agar pelaksanaan reformasi birokrasi instansi dapat mencapai sasaran yang diharapkan, peranan Kemeng



PAN dan RB semakin strategis untuk dapat memberikan sosialisasi, asistensi, monitoring, evaluasi, dan membuat penilaian atas pelaksanaan reformasi birokrasi instansi.

2. **Pemberdayaan SDM aparatur untuk mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi instansi.** Dengan berpijak atas pelaksanaan reformasi birokrasi instansi tersebut, dan menyadari bahwa pelaksanaan reformasi birokrasi akan berdampak pada kelebihan atau kekurangan pegawai di suatu instansi tertentu, BKN menetapkan kebijakan teknis dan mengoordinasikan secara teknis pelaksanaan penataan pegawai, termasuk realokasi pegawai antar kementerian/lembaga dan pemberhentian pegawai sebagai langkah terakhir. Karena realokasi pegawai seringkali memerlukan dukungan diklat, LAN diharapkan dapat memfasilitasinya dengan kebijakan diklat yang diperlukan.
3. **Perluasan reformasi birokrasi pada instansi pemerintah pusat dan daerah.** Pelaksanaan reformasi birokrasi instansi yang telah dicanangkan pada tahun 2007 dan dimulai dengan proyek percontohan di Depkeu, MA, dan BPK ini, diharapkan dapat segera diperluas di seluruh instansi. Diharapkan pada tahun 2011 seluruh instansi pusat telah berproses melaksanakan reformasi birokrasi instansi dan secara bertahap mencapai kinerja yang optimal pada tahun 2014. Secara bertahap, pelaksanaan reformasi birokrasi instansi juga diperluas hingga ke daerah. Dengan skema ini, diharapkan pada tahun 2025, kinerja instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah telah mencapai tingkat yang optimal, yaitu mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas disertai penerapan tata kelola pemerintahan yang baik.

RENCANA TINDAK PRORITAS BIDANG HUKUM DAN APARATUR

BIDANG PEMBANGUNAN : HUKUM DAN APARATUR
PRIORITAS BIDANG : Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS / KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (HASIL OUTCOMES/OUTPUT) YANG DIHARAPKAN	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI PRIORITAS 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
I	FOKUS PRIORITAS I: PENINGKATAN EFEKTIVITAS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	TERWUJUDNYA TERTIB PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	TERLAKSANANYA AKSES TERHADAP KEADILAN DI BIDANG POLITIK LEGISLASI					235,1
1	Kegiatan Penyelenggaraan Pelayanan Teknis, Pengkajian dan Penelitian serta Pertemuan Ilmiah dalam rangka pengembangan Sistem Hukum Nasional	<ul style="list-style-type: none"> - Tersedianya penelitian/kajian dan penyusunan Naskah Akademik yang berkualitas dalam penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan - Tersusunnya rekomendasi hasil penelitian di bidang substansi hukum kelembagaan hukum dan budaya hukum dalam rangka pengembangan system hukum nasional 	<ul style="list-style-type: none"> - Tersusunnya rekomendasi hasil: - 60 kajian hukum. - 4 kajian konstitusi - 40 penelitian hukum. - 75 naskah akademik - Tersedianya format Naskah Akademik yang memasukkan unsur biaya dan manfaat (cost and benefit) 	1	1	Program Pembinaan Hukum Nasional	Kementerian Hukum dan HAM	40,9
2	Kegiatan Perancangan Peraturan Perundang- undangan	Peningkatan kualitas RUU dan perat perundang-undangan di bawah UU di DPR serta tenaga fungsional Perancang PerUUan	<ul style="list-style-type: none"> - Persentase rancangan peraturan perundang-undangan dibawah UU yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan perkembangan - Persentase penyelesaian pembahasan rancangan undang-undang di DPR secara tepat waktu, 	20%	100%	Program Pembentukan Hukum	Kementerian Hukum dan HAM	75,0

BIDANG PEMBANGUNAN : HUKUM DAN APARATUR
PRIORITAS BIDANG : Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS / KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (HASIL OUTCOMES/OUTPUT) YANG DIHARAPKAN	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI PRIORITAS 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
			Persentase tenaga fungsional perancang peraturan perundang-undangan yang mendapatkan kualifikasi dan promosi sesuai standar secara tepat waktu dengan administrasi yang akuntabel					
			Persentase kelengkapan dokumentasi dan pustaka bidang peraturan perundang-undangan secara akurat dan up to date	20%	100%			
			Presentase Penyelesaian Peraturan Perundang-undangan di bidang Pertanahan, tata ruang, dan Lingkungan Hidup	20%	100%			
			Presentase Peraturan Perundang-undangan di bidang mekanisme Perlindungan Saksi dan Pelapor					
			Jumlah Peraturan Perundang-undangan di bidang yang mendorong pemberantasan korupsi	0,2	1			
3	Kegiatan Penyelenggaraan Pelayanan Teknis, Perencanaan Pembangunan Hukum, Analisa dan Evaluasi dan Penyusunan Naskah Akademik Peraturan Perundang-undangan serta Kerjasama Bidang Hukum dalam rangka pembinaan dan pengembangan sistem hukum nasional	Tersusunnya usulan RUU dan Raperda yang sesuai dengan prioritas pembangunan	- Persentase Pemetaan kebutuhan hukum baik ditingkat nasional maupun daerah secara terintegrasi dan tepat waktu untuk jangka panjang, menengah dan tahunan	50%	85%	Program Pembinaan Hukum Nasional	Kementerian Hukum dan HAM	30,0

BIDANG PEMBANGUNAN : HUKUM DAN APARATUR
PRIORITAS BIDANG : Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS / KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (HASIL OUTCOMES/OUTPUT) YANG DIHARAPKAN	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI PRIORITAS 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
			<ul style="list-style-type: none"> - Tersusunnya Daftar RUU Prioritas Prolegnas Pemerintah sejumlah 247 dan 50 % inventarisasi Prolegda - Tersedianya mekanisme Prolegnas dan Prolegda yang mendukung perencanaan pembangunan nasional - Persentase kesesuaian RUU yang dibahas dengan prioritas dalam Prolegnas 					
4	Kegiatan Penyelenggaraan Pelayanan Teknis, Pengembangan Penyuluhan Hukum dan Pembudayaan Kesadaran Hukum Nasional	Meningkatnya peran masyarakat dalam proses penyusunan peraturan perUUan	<ul style="list-style-type: none"> - Persentase keterlibatan masyarakat dalam setiap tahapan proses pembentukan peraturan perundang-undangan dan pemahaman dalam pelaksanaannya - Adanya forum komunikasi dan konsultasi penyusunan naskah akademik peraturan perundang-undangan. 	100%	100%	Program Pembentukan Hukum	Kementerian Hukum dan HAM	41,7
5	Kegiatan Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan	Meningkatkan keharmonisan rancangan peraturan perundang-undangan tingkat pusat bidang politik, hukum, keamanan, keuangan, perbankan, industri, perdagangan, sumber daya alam, riset, teknologi, kesejahteraan rakyat yang harmonis	<ul style="list-style-type: none"> - Persentase rancangan peraturan perundang-undangan tingkat pusat bidang politik, hukum dan keamanan yang harmonis. 	20%	100%	Program Pembentukan Hukum	Kementerian Hukum dan HAM	38,5

BIDANG PEMBANGUNAN : HUKUM DAN APARATUR
PRIORITAS BIDANG : Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS / KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (HASIL OUTCOMES/OUTPUT) YANG DIHARAPKAN	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI PRIORITAS 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
			- Persentase rancangan peraturan perundang-undangan tingkat pusat bidang keuangan dan perbankan yang harmonis,					
			- Persentase rancangan peraturan perundang-undangan tingkat pusat bidang industri dan perdagangan yang harmonis					
			- Persentase rancangan peraturan perundang-undangan tingkat pusat bidang kesejahteraan rakyat yang harmonis					
			- Persentase Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan di bidang Pertanahan, tata ruang, dan Lingkungan Hidup					
			- Persentase Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan di bidang mekanisme Perlindungan Saksi dan Pelapor					
			- Persentase Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan di bidang yang mendorong pemberantasan korupsi					
6	Kegiatan fasilitasi perancangan peraturan daerah	Meningkatkan pemerintahan daerah (provinsi, kab/kota) yang di petakan dan dipublikasikan peraturan daerahnya dalam sistem informasi peraturan daerah yang akurat dan up to date	- Persentase pemerintahan daerah (provinsi,kab/kota) yang dipetakan dan dipublikasikan peraturan daerahnya dalam sistem informasi peraturan daerah yang akurat dan up to date	20%	100%	Program Pembentukan Hukum	Kementerian Hukum dan HAM	9,0

BIDANG PEMBANGUNAN : HUKUM DAN APARATUR
PRIORITAS BIDANG : Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS / KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (HASIL OUTCOMES/OUTPUT) YANG DIHARAPKAN	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI PRIORITAS 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
			<ul style="list-style-type: none"> - Persentase pemerintahan daerah di wilayah I yang memperoleh fasilitasi perancangan peraturan daerah - Persentase pemerintahan daerah di wilayah II yang memperoleh fasilitasi perancangan peraturan daerah - Persentase pemerintahan daerah di wilayah III yang memperoleh fasilitasi perancangan peraturan daerah 					
II.	FOKUS PRIORITAS 2: PENINGKATAN KINERJA LEMBAGA DI BIDANG HUKUM	PENINGKATAN KINERJA LEMBAGA DI BIDANG HUKUM YANG MENDUKUNG PENEGAKAN RULE OF LAW DI INDONESIA	<ul style="list-style-type: none"> - Penurunan tunggakan perkara - Tersedianya jumlah unit pengaduan masyarakat di tiap lembaga penegak hukum - Terwujudnya lembaga peradilan yang dihormati dan disegani oleh setiap warga negara dengan diterapkannya sistem peradilan yang sederhana, cepat, transparan dan akuntabel 					9.975,0
1	Percepatan peningkatan penyelesaian perkara	Terselesainya penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah penyelesaian perkara termasuk perkara-perkara yang menarik perhatian masyarakat (perkara KKN dan HAM) - Jumlah penyelesaian mutasi perkara yg tepat waktu. 	10000 pkr	51000 pkr ^{K)}	Program Penyelesaian Perkara	MA-RI	146,9

BIDANG PEMBANGUNAN : HUKUM DAN APARATUR
PRIORITAS BIDANG : Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS / KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (HASIL OUTCOMES/OUTPUT) YANG DIHARAPKAN	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI PRIORITAS 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
			<ul style="list-style-type: none"> - Terselenggaranya pengelolaan informasi administrasi perkara secara akurat, efektif dan efisien - Tersedianya biaya penyelesaian perkara yang memadai 					
2	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan penyelesaian dan penanganan perkara	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah penyelesaian administrasi perkara (yang sederhana, dan tepat waktu) di tingkat Pertama dan Banding di lingkungan Peradilan Umum - Jumlah Penyelesaian Perkara yang kurang dari 6 (enam) bulan - Jumlah penyampaian berkas perkara Kasasi, PK dan Grasi yang lengkap dan tepat - Penyusunan kebijakan mengenai manajemen dan tata laksana di lingkungan Peradilan Umum 	145000 pkr	746250 pkr ^{K)}	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	MA-RI	320,2
3	Pengembangan kebijakan Peradilan Tipikor	Terlaksananya peradilan Tipikor di tiap provinsi di lingkungan peradilan umum	Tersusunnya kebijakan mengenai penyelenggaraan/tata laksana peradilan Tipikor	6 Lokasi	30 Lokasi ^{K)}	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	MA-RI	3,0
4	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Peningkatan penyelesaian dan penanganan perkara	Jumlah penyelesaian administrasi perkara (yang sederhana, dan tepat waktu) di tingkat Pertama dan Banding di lingkungan Peradilan Agama	80000 pkr	411600 pkr ^{K)}	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	MA-RI	102,8

BIDANG PEMBANGUNAN : HUKUM DAN APARATUR
PRIORITAS BIDANG : Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS / KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (HASIL OUTCOMES/OUTPUT) YANG DIHARAPKAN	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI PRIORITAS 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
			<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Penyelesaian Perkara yang kurang dari 6 (enam) bulan - Jumlah penyampaian berkas perkara Kasasi, PK dan Kesyar'iyahan yang lengkap dan tepat waktu - Penyusunan kebijakan mengenai manajemen dan tata laksana di lingkungan Peradilan Agama 	pk				
5	Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan TUN	Peningkatan penyelesaian dan penanganan perkara	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah penyelesaian administrasi perkara (yang sederhana, dan tepat waktu) di tingkat Pertama dan Banding di lingkungan Peradilan Peradilan Militer dan TUN - Jumlah Penyelesaian Perkara yang kurang dari 6 (enam) bulan - Jumlah penyampaian berkas perkara Kasasi, PK dan Grasi yang lengkap dan tepat waktu - Penyusunan kebijakan mengenai manajemen dan tata laksana di lingkungan Peradilan Militer dan TUN 	5000 pkr	25731 pkr ^{K1}	Program: Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan TUN	MA-RI	26,0
6	Pembinaan Administrasi pengelolaan kepegawaian dan pengembangan SDM.	Jumlah kebijakan/pedoman tentang sistem rekrutmen, pola karir, sistem promosi dan mutasi, aparat penegak hukum yang berbasis merit, transparan dan akuntabel	Jumlah rekrutmen yang transparan, adil, akuntabel dan berdasar kompetisi.	802 Satker	814 Satker	Program: Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya MA-RI	MA-RI	25,7

BIDANG PEMBANGUNAN : HUKUM DAN APARATUR
PRIORITAS BIDANG : Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS / KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (HASIL OUTCOMES/OUTPUT) YANG DIHARAPKAN	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI PRIORITAS 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
		<ul style="list-style-type: none"> · Tersedianya data informasi terpusat mengenai sumber daya manusia aparat penegak hukum yang dapat digunakan dalam pengambilan kebijakan mutasi, promosi dan sebagainya · Tersedianya informasi seleksi yang transparan dan akuntabel kepada masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> · Jumlah rekrutmen Hakim Adhoc Tipikor · Persentase Database kepegawaian kesekretariatan, diklat, dan pengawasan terintegrasi. 					
			<ul style="list-style-type: none"> · Jumlah dokumen rencana kerja pengelolaan rekrutmen yang berisi proses, metode dan tahap rekrutmen. · Tersedianya dokumen rancangan pola karir · Tersedianya dokumen rekomendasi perbaikan pola karir · Tersedianya dokumen rencana kerja pelaksanaan perbaikan pola karir. 					
7	Pembinaan Administrasi Pengelolaan Perengkapan Sarana dan Prasarana di lingkungan MA dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya	Tersedianya dokumentasi analisa data pemenuhan kebutuhan Sarana dan Prasarana di lingkungan MA dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.	Dokumen analisa data pemenuhan kebutuhan Sarana dan Prasarana di lingkungan MA dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya	802 satker	814 satker	Program Sarana dan Prasarana Aparatur Negara MA-RI	MA-RI	23,0
8	Pengadaan Sarana dan Prasarana di lingkungan MA	Tersedianya sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan peradilan di lingkungan MA	Jumlah penyediaan sarana dan prasarana di lingkungan MA Pusat	7 satker	7 satker	Program Sarana dan Prasarana Aparatur Negara MA-RI	MA-RI	566,3

BIDANG PEMBANGUNAN : HUKUM DAN APARATUR
PRIORITAS BIDANG : Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS / KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (HASIL OUTCOMES/OUTPUT) YANG DIHARAPKAN	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI PRIORITAS 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
9	Pengadaan Sarana dan Prasarana di lingkungan peradilan tingkat banding dan tingkat pertama	Tersedianya sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan peradilan tingkat banding dan tingkat pertama.	Jumlah pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana teknis dan umum peradilan tingkat banding dan tingkat daerah.	Pengad.tanah 100.000 m2	Pengad.tanah 500.000 m2	Program Sarana dan Prasarana Aparatur Negara MA-RI	MA-RI	4.270,5
				Pemb.ged baru 25 unit	Pemb.ged baru 210 unit ^{K)}			
				Pemb.lanjutan 48 unit	Pemb.lanjutan 298 unit ^{K)}			
				Pemb.rumah dinas 19 unit	Pemb.rumah dinas 149 unit ^{K)}			
				Rehab ged 90 unit	Rehab ged 450 ^{K)}			
				Reha rumah dinas 43 unit	Reha rumah dinas 265 unit ^{K)}			
				Sarana dan prasarana 795 satker	Sarana dan prasarana 795 satker			
				-	Pengad kend roda empat utk 1800 unit utk wkl dan pansek pengadilan tkt pertama ^{K)}			
Penyediaan sarana dan prasarana pengadilan Tipikor termasuk tunjangan Hakim Ad-hoc Tipikor (termasuk tunjangan kesehatan dan keamanan)	Penyediaan sarana dan prasarana dan tunjangan Hakim Ad-hoc Pengadilan Tipikor di 7 PN di ibukota Provinsi	Penyediaan sarana dan prasarana dan tunjangan Hakim Ad-hoc Pengadilan Tipikor di 340 PN di ibukota Kabupaten/Kot	^{K)}					

BIDANG PEMBANGUNAN : HUKUM DAN APARATUR
PRIORITAS BIDANG : Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS / KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (HASIL OUTCOMES/OUTPUT) YANG DIHARAPKAN	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI PRIORITAS 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
			Penyediaan sarana dan prasarana untuk menunjang penyelenggaraan Zitting Plaatz	64 lokasi	320 lokasi ^{K)}			
10	Peningkatan Profesionalitas Tenaga Teknis Peradilan dan Aparatur Peradilan di bidang Manajemen dan Kepemimpinan	Tersedianya sumber daya aparatur hukum yang profesional dan kompeten dalam melaksanakan penyelenggaraan peradilan	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah SDM yang sudah mendapatkan pelatihan teknis peradilan dan Manajemen dan Kepemimpinan yang memenuhi standar kompetensi, tugas dan kinerja - Jumlah pelatihan bagi Hakim/Hakim Adhoc dan tenaga teknis lainnya mengenai Tipikor, <i>asset recovery</i> dll - Jumlah kurikulum, silabus, materi ajar yang dikembangkan berdasarkan kebutuhan pelatihan (needs-based curriculum) - Jumlah pengembangan sistem diklat yang terhubung dengan sistem rekrutmen, sistem pengawasan dan sistem karir bagi hakim dan aparatur peradilan 	3826 org	34306 org ^{K)}	Program Pendidikan dan Pelatihan MA-RI	MA-RI	203,4

BIDANG PEMBANGUNAN : HUKUM DAN APARATUR
PRIORITAS BIDANG : Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS / KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (HASIL OUTCOMES/OUTPUT) YANG DIHARAPKAN	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI PRIORITAS 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
11	Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan	Terselenggaranya penelitian dan pengembangan bidang hukum dan peradilan.	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah kegiatan-kegiatan penelitian dan pengembangan hukum dan peradilan dengan mempertimbangkan kebutuhan lembaga peradilan dan rekomendasi unit kerja lainnya. Jumlah sistim penelitian dan pengembangan Jumlah <i>asesment</i> keterkaitan antara sistim diklat, dengan sistim rekrutmen, sistim karir bagi hakim dan aparatur pengadilan dan sistim pengawasan 	6 wil prop	50 wil prop ^{K)}	Program Pendidikan dan Pelatihan MA-RI	MA-RI	25,8
				30 audience	150 audience ^{K)}			
				9 kajian	45 kajian ^{K)}			
12	Pengawasan pelaksanaan teknis, administrasi peradilan, administrasi umum, penanganan pengaduan	Penanganan pengaduan masyarakat secara transparan, akuntabel, efektif dan efisien	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah penanganan pengawasan teknis, administrasi peradilan dan administrasi umum, serta penanganan pengaduan di Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya Jumlah sosialisasi Sistem pengelolaan pengaduan kepada aparat pengadilan dan masyarakat. 	204 laporan	1049 laporan ^{K)}	Program: Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara MA-RI	MA-RI	66,7

BIDANG PEMBANGUNAN : HUKUM DAN APARATUR
PRIORITAS BIDANG : Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS / KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (HASIL OUTCOMES/OUTPUT) YANG DIHARAPKAN	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI PRIORITAS 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
13	Pengawasan dan pemeriksaan kinerja serta perilaku aparat Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya.	Meningkatnya kualitas kinerja hakim dan aparat peradilan dan kepercayaan publik kepada lembaga peradilan.	Jumlah laporan pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan kinerja serta perilaku hakim dan aparat peradilan.	100 laporan	500 laporan ^{K)}	Program: Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara MA-RI	MA-RI	10,5
14	Penanganan Perkara PUU, SKLN, PHPU Legislatif, Pilpres, Pilgub, Pilbup, Walikota dan Perkara Lainnya	Terselesainya penyelesaian perkara yang tepat waktu, transparan dan akuntabel	Jumlah perkara PUU/SKLN dan perkara lainnya yang diputus	60	280 ^{K)}	Program Penanganan Perkara Konstitusi	MK-RI	274,4
			Jumlah perkara pemilu legislatif/presiden/wapres yang diputus	-	660 ^{K)}			
			Jumlah perkara pemilukada yang diputus	500	2350 ^{K)}			
15	Pelayanan Hubungan Masyarakat, Kerjasama, Keprotokolan dan Pengelolaan Teknologi Informasi	Tersedianya fasilitas sarana dan prasarana berbasis Teknologi Informasi dalam penanganan perkara konstitusi	Presentase informasi perkembangan penanganan perkara yang transparan dan akuntabel	100%	100%	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Teknis Lainnya Mahkamah Konstitusi RI	MK-RI	55,0
			Presentase hasil putusan yang dapat diakses publik secara on line	100%	100%			
16	Penyusunan Program, Rencana Kerja Anggaran, Pengelolaan Keuangan, dan Pengawasan	Tersusunnya rencana program kerja di lingkungan peradilan, pengelolaan keuangan dan pengawasan.	Tersusunnya rincian satuan harga penanganan perkara yang ditangani Mahkamah Konstitusi	1 pkt	3 pkt ^{K)}	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Teknis Lainnya Mahkamah Konstitusi RI	MK-RI	0,9

BIDANG PEMBANGUNAN : HUKUM DAN APARATUR
PRIORITAS BIDANG : Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS / KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (HASIL OUTCOMES/OUTPUT) YANG DIHARAPKAN	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI PRIORITAS 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
17	Penyelenggaraan Adm. Perkara, Persidangan, Putusan dan Hukum	Terselenggaranya manajemen administrasi perkara konstitusi.	Jumlah perkara yang diregisterasi dan tidak diregisterasi	560 pkr	3290 pkr ^{K1}	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Teknis Lainnya Mahkamah Konstitusi RI	MK-RI	162,2
			Jumlah persidangan dalam penyelesaian perkara	960 sidang	4800 sidang ^{K1}			
			Jumlah risalah yang diselesaikan	960 risalah	4800 risalah ^{K1}			
			Jumlah salinan putusan yang disampaikan kepada para pihak dan masyarakat	92 putusan	497 putusan ^{K1}			
			Jumlah pengaduan masyarakat yang ditangani dan ditindaklanjuti	60 pengaduan	760 pengaduan ^{K1}			
18	Pengelolaan Arsip, Pembinaan SDM dan Kerumahtanggaan	Terselenggaranya pengelolaan arsip, pembinaan SDM dan pengelolaan kelembagaan.	Jumlah peserta dan target group diklat hukum acara Mahkamah Konstitusi	500 org	2900 org ^{K1}	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Teknis Lainnya Mahkamah Konstitusi RI	MK-RI	29,9
			Jumlah pegawai yang mengikuti diklat kepaniteraan	100 pegawai	600 pegawai ^{K1}			
			Jumlah pegawai yang mengikuti program rintisan gelar	24 pegawai	161 pegawai ^{K1}			
			Presentase penyusunan analisis kebutuhan SDM	40%	100%			
			Presentase penerapan perekrutan pegawai baru sesuai dengan standar mutu organisasi internasional (ISO)	50%	100%			

BIDANG PEMBANGUNAN : HUKUM DAN APARATUR
PRIORITAS BIDANG : Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS / KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (HASIL OUTCOMES/OUTPUT) YANG DIHARAPKAN	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI PRIORITAS 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
			Prosentase penyusunan analisa beban kerja unit kerja dan pegawai	60%	100%			
			Prosentase penyempurnaan struktur organisasi	65%	100%			
19	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung	Pengembangan sistem informasi dalam penanganan perkara konstitusi	Jumlah pengembangan sistem informasi terkait dengan penanganan perkara	6 paket	26 paket ^{K3}	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Konstitusi RI	MK-RI	44,2
20	Sistem Informasi Manajemen	Tersedianya basis data yang dapat menyajikan informasi data perkara secara akurat, cepat dan lengkap dalam rangka mewujudkan penanganan perkara secara cepat dan akuntabel serta dapat diakses oleh masyarakat;	Jumlah kegiatan pendataan perkara yang disajikan berdasarkan jenis penanganan perkara termasuk jenis perkara KDRT, perkara anak dan perkara lainnya (statistik kriminal).	1 keg	1 keg	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Kejaksaan Agung	151,9
			Jumlah Kegiatan Penunjang Operasional Simkari-2	4 keg	22 keg ^{K3}			
21	Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kejaksaan	Meningkatnya kemampuan profesional, integritas kepribadian dan disiplin di lingkungan Kejaksaan.	Jumlah pendidikan dan pelatihan baik penjenjangan maupun fungsional	35	185 ^{K3}	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kejaksaan Agung	Kejaksaan Agung	420,1
22	Pembinaan dan Pengelolaan Kepegawaian, di Kejangug, Kejati, Kejari dan Cabjari.	Meningkatnya kualitas Pembinaan kepegawaian meliputi rekrutmen pegawai, jenjang karier dan mutasi pegawai;	Jumlah dokumen Blue Print mengenai rekrutmen pegawai, pola jenjang karier dan mutasi pegawai.	-	3 dok blueprint keg	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kejaksaan Agung	Kejaksaan Agung	8,6
			Jumlah kegiatan manajemen kepegawaian	6 keg	6 keg			
23	Peningkatan Pengawasan Bidang Tindak Pidana Umum	Meningkatnya kualitas pengawasan atas pelaksanaan tugas rutin dan pembangunan semua unsur Kejaksaan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung.	Jumlah laporan pengaduan masyarakat terhadap penyalahgunaan wewenang dalam penanganan perkara tindak pidana umum yang ditindaklanjuti	100 lapdu	2100 lapdu ^{K3}	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kejaksaan	Kejaksaan Agung	33,1

BIDANG PEMBANGUNAN : HUKUM DAN APARATUR
PRIORITAS BIDANG : Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS / KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (HASIL OUTCOMES/OUTPUT) YANG DIHARAPKAN	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI PRIORITAS 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
24	Peningkatan Pengawasan Bidang Intelijen	Meningkatnya kualitas pengawasan atas pelaksanaan tugas rutin dan pembangunan semua unsur Kejaksaan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung	Jumlah laporan pengaduan masyarakat terhadap penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan kegiatan operasi intelijen yang ditindaklanjuti	30 lapdu	830 lapdu ^{K)}	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kejaksaan	Kejaksaan Agung	13,0
25	Peningkatan Pengawasan Bidang Pidana Khusus, Perdata dan Tata Usaha Negara	Meningkatnya kualitas pengawasan atas pelaksanaan tugas rutin dan pembangunan semua unsur Kejaksaan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung.	Jumlah laporan pengaduan masyarakat terhadap penyalahgunaan wewenang dalam penanganan perkara pidana khusus, tindak pidana korupsi dan perkara perdata dan tata usaha negara yang ditindaklanjuti	10 lapdu	810 lapdu ^{K)}	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kejaksaan	Kejaksaan Agung	12,8
26	Peningkatan Pengawasan Aparatur Kejaksaan oleh Kejati dan jajaran pengawasan di daerah	Meningkatnya kualitas pengawasan atas pelaksanaan tugas rutin dan pembangunan semua unsur Kejaksaan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung.	Jumlah laporan pengaduan masyarakat terhadap penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh seluruh aparat Kejaksaan, baik di Kejati dan jajaran pengawas di daerah yang ditindaklanjuti	10 lapdu	610 lapdu ^{K)}	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kejaksaan	Kejaksaan Agung	7,4
27	Manajemen Sumber Daya Manusia	Sumber Daya Manusia	Tingkat Layanan (SLA Biro SDM) dan Kepuasan Pegawai (Indeks, Skala 1-5)	3,25	3,29	Program Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	KPK	1.973,0

BIDANG PEMBANGUNAN : HUKUM DAN APARATUR
PRIORITAS BIDANG : Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS / KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (HASIL OUTCOMES/OUTPUT) YANG DIHARAPKAN	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI PRIORITAS 2010-2014 (Rp. Miliar)
				2010	2014			
28	Penanganan Pengaduan Masyarakat	Penanganan Dumas	- Kasus siap LIDIK (Jumlah)	56	392 ^{K)}	Program Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	KPK	25,0
29	Pembinaan Penyelenggaraan Kegiatan di bidang Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan barang Rampasan Negara	Terkelolanya Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Perkara.	Persentase benda sitaan negara dan barang rampasan negara yang dikelola secara tepat waktu dan akuntabel	70%	90%	Program Pembinaan Penyelenggaraan Pemasyarakatan	Kementerian Hukum dan HAM	2,0
30	Pembinaan Penyelenggaraan Kegiatan di bidang Keamanan dan Ketertiban	Penyelenggaraan kegiatan di bidang keamanan dan kettertiban yang berkualitas serta pengelolaan benda sitaan Negara dan barang rampasan Negara.	- Persentase Lapas Rutan yang memenuhi standar hunian dan keamanan - Persentase penanganan kasus penyebaran NAPZA kejahatan terorganisir dan pelanggaran kode etik petugas pemasyarakatan di UPT PAS - Persentase pengaduan masyarakat maupun tahanna dan warga binaan pemasyarakatan yang ditindaklanjuti secara cepat dan tepat	10%	30%	Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemasyarakatan	Kementerian Hukum dan HAM	5,8

BIDANG PEMBANGUNAN : HUKUM DAN APARATUR
PRIORITAS BIDANG : Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS / KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (HASIL OUTCOMES/OUTPUT) YANG DIHARAPKAN	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI PRIORITAS 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
31	Pembinaan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pelayanan Tahanan dan Pembinaan Narapidana	Terlaksananya pembinaan terhadap tahanan dan narapidana yang tepat dan akuntabel.	Persentase tahanan dan narapidana yang teregistrasi dan terklasifikasi secara tepat dan akuntabel	62%	82%	Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemasyarakatan	Kementerian Hukum dan HAM	3,4
			Persentase narapidana yang terserap di kegiatan kerja secara tepat dan akuntabel	60%	80%			
			Persentase narapidana yang memperoleh pembinaan kepribadian secara tepat dan akuntabel	60%	90%			
32	Pembinaan Penyelenggaraan kegiatan di bidang Bimbingan kemasyarakatan dan Anak	Penyelenggaraan kegiatan bimbingan kemasyarakatan dan anak yang berkualitas	Persentase anak didik pemasyarakatan yang memperoleh pendidikan dan reintegrasi secara tepat waktu dan akuntabel	62%	82%	Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemasyarakatan	Kementerian Hukum dan HAM	7,1
			Persentase anak didik pemasyarakatan yang memperoleh pendampingan dan pembimbingan secara tepat dan akuntabel					
			Persentase klien pemasyarakatan yang memperoleh pembimbingan dan pengawasan secara tepat dan akuntabel					
			Persentase anak didik pemasyarakatan dan klien pemasyarakatan yang mendapatkan litmas secara tepat dan akuntabel					

BIDANG PEMBANGUNAN : HUKUM DAN APARATUR
PRIORITAS BIDANG : Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS / KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (HASIL OUTCOMES/OUTPUT) YANG DIHARAPKAN	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI PRIORITAS 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
33	Pembinaan Penyelenggaraan Kegiatan di bidang Kesehatan dan Perawatan warga binaan pemasyarakatan	Penyelenggaraan kegiatan di bidang kesehatan dan perawatan yang berkualitas	<ul style="list-style-type: none"> - Persentase tahanan narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang memperoleh perawatan dan pelayanan kesehatan sesuai standar kesehatan - Penurunan jumlah penyakit menular - Persentase bayi, ibu hamil, ibu menyusui dan kelompok resiko tinggi yang memperoleh perlindungan secara tepat waktu dan akuntabel 	30%	50%	Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemasyarakatan	Kementerian Hukum dan HAM	9,8
34	Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan dan Manajemen	Peningkatan kualitas SDM hukum dan HAM	Peningkatan kinerja lulusan diklat kepemimpinan dan manajemen pada unit kerja	92%	97%	Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kementerian Hukum dan HAM	Kementerian Hukum dan HAM	38,0
35	Kegiatan penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis	Peningkatan kualitas SDM hukum dan HAM	Persentase peningkatan kinerja lulusan diklat di bidang teknis pada unit kerjanya	92%	97%	Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kementerian Hukum dan HAM	Kementerian Hukum dan HAM	37,0
36	Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Fungsional HAM	Peningkatan kualitas SDM hukum dan HAM	Persentase peningkatan kinerja lulusan diklat di bidang fungsional dan HAM pada unit kerjanya	92%	97%	Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kementerian Hukum dan HAM	Kementerian Hukum dan HAM	40,6
37	Kegiatan Pendidikan Kedinasan	Peningkatan kualitas SDM hukum dan HAM	Persentase lulusan yang menguasai ilmu dan keahlian teknis pemasyarakatan	92,00%	97%	Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kementerian Hukum dan HAM	Kementerian Hukum dan HAM	50,2
			Persentase lulusan yang menguasai ilmu dan keahlian teknis keimigrasian	92,00%	97%			

BIDANG PEMBANGUNAN : HUKUM DAN APARATUR
PRIORITAS BIDANG : Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS / KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (HASIL OUTCOMES/OUTPUT) YANG DIHARAPKAN	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI PRIORITAS 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
38	Kegiatan Pengelolaan dan Pembinaan Kepegawaian Kemenkumham	Peningkatan kualitas SDM Kemenkumham	Persentase unit kerja yang memiliki kaderisasi berkesinambungan dan pegawai yang memperoleh pengembangan karir	-100% dari formasi Penyesuaian ijazah S1,S2;	100%	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kemenkumham	Kementerian Hukum dan HAM	108,2
				- 100% dari formasi pim tk III dan IV	100%			
				- 100% dari formasi ujian dinas TK I dan II;	100%			
				- 100% dari formasi yang mengikuti pendidikan dasar keimigrasian dan teknis keimigrasian;	100%			
				- 100% data daftar kebutuhan pegawai untuk penyusunan formasi;	100%			
				- 80% Pengadaan CPNS pusat dan kanwil	100%			
			Seluruh unit kerja memiliki SDM profesional sesuai dengan kebutuhan dan kaderisasi yang berkesinambungan.	100% dari jumlah formasi yang mengikuti Fit and Proper Test dalam rangka usulan promosi jabatan	100%			

BIDANG PEMBANGUNAN : HUKUM DAN APARATUR
PRIORITAS BIDANG : Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS / KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (HASIL OUTCOMES/OUTPUT) YANG DIHARAPKAN	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI PRIORITAS 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
39	Kegiatan pengawasan Inspektorat khusus	Tersedianya mekanisme pengaduan masyarakat yang responsif terhadap kinerja aparat Kemenkumham.	- Persentase pengaduan dan kasus yang dituntaskan secara tepat waktu	20%	100%	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kemenkumham	Kementerian Hukum dan HAM	19,0
40	Pelayanan dokumen perjalanan visa dan fasilitas keimigrasian	Peningkatan pelayanan dokumen perjalanan, visa dan fasilitas keimigrasian.	- Biaya pelayanan keimigrasian yang transparan - Persentase Penerbitan persetujuan visa yang memenuhi standar dengan data akurat - Persentase Kebijakan pemberian paspor RI yang memenuhi standar dengan data akurat - Persentase Pemberian paspor TKI Timur Tengah yang memiliki standar - Jumlah dan jenis fasilitas keimigrasian yang diberikan memenuhi standar - Persentase Kebijakan pemberian izin keimigrasian yang memenuhi standar dengan data akurat	80%	85%	Program Peningkatan Pelayanan dan Pengawasan Keimigrasian	Kementerian Hukum dan HAM	35,0
41	Persetujuan izin tinggal dan status keimigrasian	Peningkatan pelayanan pemberian izin tinggal dan status keimigrasian	- Persentase persetujuan izin tinggal yang diterbitkan - Persentase Persetujuan alih status yang diterbitkan sesuai standar	85%	90%	Program Peningkatan Pelayanan dan Pengawasan Keimigrasian	Kementerian Hukum dan HAM	2,9

BIDANG PEMBANGUNAN : HUKUM DAN APARATUR
PRIORITAS BIDANG : Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS / KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (HASIL OUTCOMES/OUTPUT) YANG DIHARAPKAN	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI PRIORITAS 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
			Jumlah persetujuan Surat Keterangan Keimigrasian (SKIM) dan penelaahan status kewarganegaraan yang diterbitkan sesuai standar					
42	Kegiatan administrasi badan hukum	Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan jasa badan hukum PT dan badan hukum social yang sesuai standard an akuntabel serta berbasis IT dengan waktu yang lebih singkat dan biaya rendah	<ul style="list-style-type: none"> - Persentase adm pelayanan jasa hukum Perseroan Tertutup yang sesuai standar dan akuntabel - Persentase adm pelayanan jasa hukum PT, Lembaga Keuangan dan fasilitas penanaman modal yang sesuai standard an akuntabel - Persentase adm pelayanan jasa hukum badan hukum social yang sesuai standard an akuntabel - Persentase pengumuman dlm TBN secara tepat waktu dan persentase layanan permohonan badan hukum berbasis IT dengan data yang lengkap dan akurat - Persentase penyelesaian gugatan masy dan pemberian pendapat hukum secara akuntabel 	80%	95%	Program Administrasi Hukum Umum	Kementerian Hukum dan HAM	127,0
43	Penyelenggaraan sistem Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang	Peningkatan kualitas system Hak Cipta, Design Industri, Desaign tata letak Sirkit Terpadu, dan Rahasia Dagang yang memperoleh perlindungan hukum dengan waktu yang lebih singkat dan biaya rendah	Presentasi pendaftaran hak cipta Design Industri, Desaign tata letak Sirkit Terpadu, dan Rahasia Dagang	20%	100%	Program Pembinaan/Penyelenggaraan HAKI	Kementerian Hukum dan HAM	8,6

BIDANG PEMBANGUNAN : HUKUM DAN APARATUR
PRIORITAS BIDANG : Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS / KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (HASIL OUTCOMES/OUTPUT) YANG DIHARAPKAN	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI PRIORITAS 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
			· Persentase administrasi kelengkapan dokumen permohonan, mutasi dan lisensi hak cipta, hak tata letak sirkuit terpadu, desain industri dan rahasia dagang yang sesuai standar	20%	100%			
			· Persentase administrasi klasifikasi dan penyelesaian pemeriksaan substantif desain industri yang sesuai standar	20%	100%			
			· Persentase pengumuman desain industri dan penerbitan surat pendaftaran ciptaan, sertifikat desain tata letak sirkuit terpadu serta sertifikat dan perpanjangan desain industri yang sesuai standar	20%	100%			
			· Persentase pelayanan hukum di bidang hak cipta, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu dan rahasia dagang yang sesuai standar	20%	100%			
44	Penyelenggaraan Sistem Paten	Peningkatan kualitas system paten yang memperoleh perlindungan hukum dengan waktu yang lebih singkat dan biaya rendah	Persentase administrasi pemeriksaan substantif sesuai standar	20%	100%	Program Pembinaan/Penyelenggaraan HAKI	Kementerian Hukum dan HAM	14,0
			Persentase administrasi penerbitan sertifikat paten dan pemeliharaan sesuai standar	20%	100%			
			· Persentase pelayanan hukum di bidang paten sesuai standar	20%	100%			

BIDANG PEMBANGUNAN : HUKUM DAN APARATUR
PRIORITAS BIDANG : Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS / KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (HASIL OUTCOMES/OUTPUT) YANG DIHARAPKAN	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI PRIORITAS 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
45	Penyelenggaraan Sistem Merek dan Indikasi Geografis	Peningkatan kualitas system Merek dan Indikasi geografis dengan waktu yang lebih singkat dan biaya rendah	<ul style="list-style-type: none"> - Presentasi pendaftaran hak merek dan indikasi geografis - Persentase administrasi kelengkapan dokumen permohonan merek dan indikasi geografis, perpanjangan, mutasi dan lisensi serta pengklasifikasian merek sesuai standar - Persentase administrasi pemeriksaan substantif merek - Persentase administrasi pemeriksaan substantif indikasi geografis sesuai standar - Persentase penerbitan sertifikat merek dan indikasi geografis serta perpanjangan merek sesuai standar - Persentase pelayanan hukum di bidang merek 	20%	100%	Program Pembinaan/Penyelenggaraan HAKI	Kementerian Hukum dan HAM	17,4

BIDANG PEMBANGUNAN : HUKUM DAN APARATUR
PRIORITAS BIDANG : Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS / KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (HASIL OUTCOMES/OUTPUT) YANG DIHARAPKAN	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI PRIORITAS 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
46	Penyelenggaraan Sistem Teknologi Informasi HKI	Peningkatan jumlah layanan HKI yang bisa diakses masyarakat secara on line dengan sistem aplikasi dan basis data yang akurat	<ul style="list-style-type: none"> - Persentase unit kerja HKI yang terintegrasi dalam aplikasi sistem informasi HKI yang terjamin keamanannya - Persentase unit kerja HKI dan kantor wilayah yang terintegrasi melalui sistem jaringan terintegrasi Kemenkumham - Presentase Jumlah dan jenis informasi HKI yang dapat diakses masyarakat secara on line 24 jam dengan data yang up to date - Persentase kelengkapan dokumentasi HKI secara manual dan digital 	20%	100%	Program Pembinaan/Penyelenggaraan HAKI	Kementerian Hukum dan HAM	57,7
47	Penyelenggaraan perencanaan dan pengelolaan keuangan perlengkapan rumah tangga serta tata usaha dan pengembangan sumber daya manusia di lingkungan Komisi Yudisial	Terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan, pengelolaan administrasi keuangan, perlengkapan, dan rumah tangga, serta tata usaha dan pengembangan SDM di lingkungan Komisi Yudisial	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah dokumen anggaran yang disusun - Jumlah MoU Komisi Yudisial yang ditindaklanjuti - Jumlah penelaahan dan bantuan hukum yang ditangani hingga tuntas. - % laporan keuangan yang sesuai dengan Sistem Akuntansi Pemerintah - % ketersediaan arsip dalam memenuhi kebutuhan administrasi dan keuangan - Pendapat yang dikeluarkan oleh eksternal auditor atas laporan keuangan - % sumber daya manusia yang memiliki kemampuan dan keahlian sesuai bidangnya - Biaya rata-rata pelaksanaan administrasi umum 	10	50 ^{K3)}	Program Dukungan manajemen & pelaksanaan tugas teknis lainnya Komisi Yudisial	Komisi Yudisial	295,7
				10	50 ^{K3)}			
				20	100 ^{K3)}			
				100%	100%			
				100%	100%			
				Opini BPK WTP	Opini BPK WTP			
				70%	90%			
				Penghematan 20%	Penghematan 20%			

BIDANG PEMBANGUNAN : HUKUM DAN APARATUR
PRIORITAS BIDANG : Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS / KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (HASIL OUTCOMES/OUTPUT) YANG DIHARAPKAN	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI PRIORITAS 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
48	Seleksi Hakim Agung, Seleksi Hakim dan Pemberian Penghargaan Hakim	Memperoleh calon Hakim Agung kompeten untuk diajukan ke DPR, serta pemberian	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah calon Hakim Agung yang mendaftar - Jumlah calon Hakim Agung yang lulus seleksi - Jumlah hakim berprestasi yang diusulkan menerima penghargaan - Jumlah pelaksanaan monitoring profesionalisme Hakim Agung - Jumlah putusan hakim tingkat pertama, tingkat banding, dan MA yang diteliti dan dianalisa - % putusan hakim yang amar putusannya sesuai dengan pertimbangan hukum serta fakta hukum - Biaya maksimal kegiatan penelitian putusan hakim (dalam ribu) 	80	333 ^{K)}	Program peningkatan kinerja seleksi hakim agung dan	Komisi Yudisial	45,8
				6	72 ^{K)}			
				4	20 ^{K)}			
				1	9 ^{K)}			
				200	1000 ^{K)}			
				100%	100%			
				Rp.50.000	Rp.50.000			

BIDANG PEMBANGUNAN : HUKUM DAN APARATUR
PRIORITAS BIDANG : Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS / KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (HASIL OUTCOMES/OUTPUT) YANG DIHARAPKAN	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI PRIORITAS 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
			- % peserta yang mendaftar dalam seleksi calon Hakim Agung	75%	85%			
			- % Hakim Agung yang profesional hasil seleksi	75%	85%			
			- % calon Hakim Agung yang lulus seleksi	75%	85%			
			- % calon hakim yang lolos pemberian penghargaan	75%	90%			
			- Jumlah peserta seleksi calon hakim yang mendaftar	1000	5700 ^{ki}			
			- Jumlah peserta seleksi calon hakim yang lulus seleksi	500	2850 ^{ki}			
			- % peserta seleksi calon hakim yang lulus sesuai kompetensi	80%	80%			
			- Biaya rata-rata seleksi calon hakim	Penghematan 20%	Penghematan 20%			
			- Biaya rata-rata kegiatan seleksi Hakim Agung per pendaftar (dalam ribu)	Rp. 32.500	Rp 51240			
			- Biaya rata-rata kegiatan usulan pemberian penghargaan hakim (dalam ribu)	Rp.1000000	Rp1.200.000			

BIDANG PEMBANGUNAN : HUKUM DAN APARATUR
PRIORITAS BIDANG : Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS / KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (HASIL OUTCOMES/OUTPUT) YANG DIHARAPKAN	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI PRIORITAS 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
49	Pelayanan pengawasan perilaku hakim dan peningkatan kompetensi hakim	Penyelesaian laporan pengaduan hakim yang diduga melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim, serta meningkatnya kemampuan dan profesionalisme hakim	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim - Jumlah sidang pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim yang diproses melalui Majelis Kehormatan Hakim (MKH) - % pengaduan masyarakat yang ditangani hingga tuntas - % hasil putusan Majelis Kehormatan Hakim yang sesuai dengan prinsip-prinsip dalam kode etik dan pedoman perilaku hakim - Jumlah pelatihan kemampuan dan profesionalisme hakim yang dilaksanakan - % Peningkatan kemampuan dan profesionalisme hakim - Biaya rata-rata pelaksanaan pelatihan - Biaya rata-rata penanganan laporan pengaduan masyarakat hingga tuntas 	<ul style="list-style-type: none"> 1719 15 70% 100% 5 80% Penghematan 20% Penghematan 20% 	<ul style="list-style-type: none"> 7029 ^{K)} 105 ^{K)} 75% 100% 33 ^{K)} 90% Penghematan 20% Penghematan 20% 	Program peningkatan kinerja seleksi hakim agung dan pengawasan perilaku hakim	Komisi Yudisial	47,5

BIDANG PEMBANGUNAN : HUKUM DAN APARATUR
PRIORITAS BIDANG : Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS / KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (HASIL OUTCOMES/OUTPUT) YANG DIHARAPKAN	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI PRIORITAS 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
III.	FOKUS PRIORITAS 3: PENINGKATAN PENGHORMATAN TERHADAP HAM	MENINGKATNYA UPAYA PEMENUHAN DAN PERLINDUNGAN SERTA PENEGAKAN HAK-HAK ASASI MANUSIA SESUAI DENGAN HAK-HAK YG TERCANTUM DLM KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU	Persentase Kementerian/Lembaga yang telah melaksanakan kebijakan berdasarkan pendekatan HAM (<i>Human Rights Based Approach</i>).					1.130,1
1	Penyediaan dana bantuan hukum di Pengadilan Tingkat Pertama	Penyelesaian perkara pidana bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	<ul style="list-style-type: none"> · Jumlah Penyediaan dana bantuan hukum di Pengadilan Tingkat Pertama · Kebijakan mengenai bantuan hukum bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan · Jumlah Pembangunan atau perbaikan fungsi operasionalisasi <i>Zitting Plaatz</i> dan pelaksanaan sidang keliling untuk menjangkau segenap lapisan masyarakat 	53960 pkr	174785 pkr ⁸⁾	Program: Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	MA-R1	174,7

BIDANG PEMBANGUNAN : HUKUM DAN APARATUR
PRIORITAS BIDANG : Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS / KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (HASIL OUTCOMES/OUTPUT) YANG DIHARAPKAN	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI PRIORITAS 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
2	Penyediaan dana bantuan hukum di Pengadilan Agama	Penyelesaian perkara peradilan agama bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	<ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan dana prodeo di Pengadilan Tingkat Pertama - Mengoptimalkan fungsi pelaksanaan sidang keliling untuk menjangkau segenap lapisan masyarakat 	372 satker	1924 satker ^{K)}	Program: Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	MA-RI	102,7
3	Penyediaan dana bantuan hukum di Pengadilan Militer dan TUN	Penyelesaian perkara peradilan Militer dan TUN di wilayah yang belum terjangkau peradilan Militer dan TUN	Kebijakan mengenai bantuan hukum bagi masyarakat di wilayah yang belum terjangkau peradilan Militer dan TUN	124 pkr	639 pkr ^{K)}	Program: Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan TUN	MA-RI	639,0
			<ul style="list-style-type: none"> - Pelaksanaan sidang keliling (hakim terbang) untuk menjangkau segenap lapisan masyarakat 	23 satker	115 satker ^{K)}			26,0
4	Penanganan Penyidikan Pelanggaran HAM yang Berat	Meningkatnya penyelesaian penanganan perkara pelanggaran HAM yang berat secara cepat, tepat dan akuntabel	Jumlah penyidikan perkara pelanggaran HAM yang berat yang diselesaikan	10 pkr	30 pkr ^{K)}	Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pidus, Pelanggaran HAM Berat, Perkara Tindak Pidana Korupsi	Kejaksaan Agung	0,8

BIDANG PEMBANGUNAN : HUKUM DAN APARATUR
PRIORITAS BIDANG : Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS / KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (HASIL OUTCOMES/OUTPUT) YANG DIHARAPKAN	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI PRIORITAS 2010-2014 (Rp. Miliar)
				2010	2014			
5	Peningkatan Penuntutan perkara pelanggaran HAM yang berat	Meningkatnya penyelesaian perkara pelanggaran HAM yang berat secara cepat, tepat dan akuntabel	Jumlah perkara pelanggaran HAM yang berat yang diselesaikan dalam tahap Penuntutan.	5 pkr	25 pkr ^{K)}	Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pidus, Pelanggaran HAM Berat, Perkara Tindak Pidana Korupsi	Kejaksaan Agung	0,5
6	Penguatan Kesadaran HAM Masyarakat dan Aparatur Negara	Meningkatnya kesadaran HAM masyarakat dan aparaturnegara melalui penguatan peraturan perundang-undangan yang berperspektif HAM	Jumlah rekomendasi yang terkait dengan pembentukan, perubahan dan pencabutan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan HAM	8	30 ^{K)}	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Komnas HAM	Komnas HAM	41,7
			Tingkat rekomendasi hasil pengkajian dan penelitian yang terkait dengan pembentukan, perubahan dan pencabutan peraturan perundang-undangan nasional serta ratifikasi instrumen HAM internasional	50%	80%			

BIDANG PEMBANGUNAN : HUKUM DAN APARATUR
PRIORITAS BIDANG : Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS / KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (HASIL OUTCOMES/OUTPUT) YANG DIHARAPKAN	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI PRIORITAS 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
			Tingkat tindak lanjut dari rekomendasi hasil pengkajian dan penelitian yang terkait dengan pembentukan, perubahan & pencabutan peraturan perundang-undangan nasional serta ratifikasi instrumen HAM internasional	50%	75%			
			Tersedianya alat ukur pemenuhan HAM (hak dasar)	4	10			
			Meningkatnya kesadaran masyarakat dan aparat negara terhadap kegiatan pemajuan HAM melalui <i>klien feedback survey</i> (Jumlah survey)	2	15 ⁸⁾			
			Presentase kenaikan alumni pelatihan yang menjadi fasilitator HAM	5%	25%			
			Presentase kenaikan pemahaman aparat negara terhadap ketaatan atas produk perundang-undangan yang berperspektif HAM.	10%	10%			

BIDANG PEMBANGUNAN : HUKUM DAN APARATUR
PRIORITAS BIDANG : Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS / KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (HASIL OUTCOMES/OUTPUT) YANG DIHARAPKAN	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI PRIORITAS 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
7	Peningkatan Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM	Terlaksananya penanganan dan penyelesaian kasus pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dan instansi terkait	Prosentase penanganan pengaduan kasus pelanggaran HAM yang disampaikan kepada Komnas HAM	80%	90%	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Komnas HAM	Komnas HAM	58,3
			Tersedianya sistem pengaduan <i>online</i> dan <i>database</i> pengaduan (Aplikasi)	1	1			
			Prosentase rekomendasi terkait kasus pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti oleh pihak terkait	40%	65%			
			Jumlah rekomendasi hasil penyelidikan Komnas HAM terkait kasus pelanggaran HAM berat yang ditindaklanjuti Jaksa Agung	2	8 ^{ki}			
			Prosentase kasus pelanggaran HAM yang diselesaikan melalui mekanisme mediasi	40%	85%			
			Prosentase pelaksanaan hasil mediasi kasus-kasus pelanggaran HAM	40%	75%			

BIDANG PEMBANGUNAN : HUKUM DAN APARATUR
PRIORITAS BIDANG : Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS / KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (HASIL OUTCOMES/OUTPUT) YANG DIHARAPKAN	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI PRIORITAS 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
			Tingkat pelibatan dan penyikapan aparat negara dalam upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan serta perlindungan, penegakan dan pemajuan HAM perempuan	30%	30%			
			Tingkat pelibatan dan penyikapan masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan serta perlindungan, penegakan dan pemajuan HAM perempuan	50%	50%			
			Tingkat rekomendasi hasil pengkajian dan penelitian yang terkait dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan instrumen internasional yang relevan bagi perlindungan HAM perempuan	50%	50%			
			Jumlah pemantauan termasuk pencarian fakta dan pendokumentasian pelanggaran HAM perempuan	10	50 ^{ks)}			

BIDANG PEMBANGUNAN : HUKUM DAN APARATUR
PRIORITAS BIDANG : Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS / KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (HASIL OUTCOMES/OUTPUT) YANG DIHARAPKAN	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI PRIORITAS 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
			Presentase pengaduan pelanggaran HAM perempuan yang ditindaklanjuti	50%	50%			
			Presentase pendampingan dan sistem pemulihan korban pelanggaran HAM yang dikembangkan	25%	75%			
			Presentase jumlah mekanisme penyelesaian alternatif yang dikembangkan	25%	45%			
			Presentase pendokumentasian pelanggaran HAM yang terjadi	50%	90%			
			Presentase advokasi terhadap korban pelanggaran HAM	50%	50%			
			Meningkatnya fungsi kelembagaan Komnas Perempuan dalam rangka menciptakan lembaga yang independen, transparan, dan akuntabel dalam menjalankan mandat Komnas Perempuan.	20%	40%			

BIDANG PEMBANGUNAN : HUKUM DAN APARATUR
PRIORITAS BIDANG : Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS / KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (HASIL OUTCOMES/OUTPUT) YANG DIHARAPKAN	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI PRIORITAS 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
9	Kegiatan Kerjasama HAM	Peningkatan kerjasama dalam dan luar negeri dlm rangka pemajuan HAM dan harmonisasi rancangan peraturan perUUan dalam perspektif HAM serta NA instrument HAM internasional	<ul style="list-style-type: none"> - Prosentase harmonisasi rancangan peraturan per-UUan dalam perspektif HAM - Jumlah analisis laporan pelaksanaan instrument HAM Internasional dan Naskah akademik instrument HAM Internasional - Jumlah kerjasama luar negeri dalam rangka pemajuan HAM - Jumlah kerjasama dalam negeri dalam rangka implementasi HAM/RANHAM 	100%	100%	Program Perlindungan dan Pemenuhan HAM	Kementerian Hukum dan HAM	9,0
				6 Inst. HAM Internasional dan 2 N.A	6 Inst. HAM Internasional dan 2 N.A			
				10 Negara/ NGO;	10 Negara/ NGO;			
				440 pusat dan daerah	440 pusat dan daerah			
10	Kegiatan Penguatan HAM	Diterapkannya perspektif HAM dalam pelaksanaan kegiatan pada semua bidang pembangunan	<ul style="list-style-type: none"> - Tersusunnya pedoman dan standarisasi kebijakan di semua bidang pembangunan yang berperspektif HAM - Persentase Kementerian/Lembaga yang telah melaksanakan kebijakan yang berperspektif HAM - Jumlah program pembelajaran HAM - Jumlah bahan ajar HAM - Jumlah fasilitator pelatihan HAM - Jumlah pelatihan HAM 	10	50 ^{K)}	Program Perlindungan dan Pemenuhan HAM	Kementerian Hukum dan HAM	10,0
				10%	10%			
				40	200 ^{K)}			
				10	50 ^{K)}			

BIDANG PEMBANGUNAN : HUKUM DAN APARATUR
PRIORITAS BIDANG : Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS / KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (HASIL OUTCOMES/OUTPUT) YANG DIHARAPKAN	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI PRIORITAS 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
11	Kegiatan Diseminasi HAM	Meningkatnya Kementeri an/Lembaga, Pemerintah Propinsi dan Kabupaten/Kota yang telah memperoleh diseminasi HAM	Jumlah K/L atau daerah yang telah melaksanakan RAN HAM	34 kab/kota	34 kab/kota	Program Pemajuan HAM	Kementerian Hukum dan HAM	8,0
			Jumlah penyuluh HAM	136	680 ^{K)}			
			Jumlah evaluasi dan pengembangan diseminasi HAM	34 kab/kota	34 kab/kota			
12	Kegiatan Informasi HAM	Informasi yang dapat diakses dari K/L, Provinsi dan Kabupaten/kota tentang HAM	Jumlah data HAM yang diolah dari KL propinsi dan kabupaten/kota	156	850 ^{K)}	Program Pemajuan HAM	Kementerian Hukum dan HAM	7,0
			Jumlah evaluasi dan laporan tentang HAM	156	850 ^{K)}			
			Jmlah akses jalur informasi HAM melalui penyediaan koneksi internet	156	850 ^{K)}			
			Jumlah layanan informasi melalui media cetak dan elektronik	156	850 ^{K)}			
IV.	Fokus Prioritas 4 : PENINGKATAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YANG BERSIH DAN BEBAS KORUPSI, KOLUSI, DAN NEPOTISME	Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan babas KKN	IPK	2,8	5,0			1.306,0
			RAD-PK di Provinsi/Kabupaten/Kota (Provinsi Tahun 2009 adalah 72,7%)	72,7	100			
			Opini WTP Audit BPK atas LK K/L (%)	42,17	100			
			Opini WTP Audit BPK atas LK Pemda (%)	2,73	60			

BIDANG PEMBANGUNAN : HUKUM DAN APARATUR
PRIORITAS BIDANG : Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS / KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (HASIL OUTCOMES/OUTPUT) YANG DIHARAPKAN	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI PRIORITAS 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
1	Penanganan Penydikan Tindak Pidana Korupsi	Meningkatnya penyelesaian perkara tindak pidana korupsi secara cepat, tepat dan akuntabel.	Jumlah Penydikan perkara tindak pidana Korupsi yang diselesaikan	145 pkr	725 pkr ^{K)}	Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pidana Khusus, Pelanggaran HAM Berat dan Perkara Tindak Pidana Korupsi	Kejaksaan Agung	53,3
2	Peningkatan Penuntutan perkara pidana korupsi	Meningkatnya penyelesaian perkara pidana korupsi yang berat secara cepat, tepat dan akuntabel.	Jumlah perkara tindak pidana korupsi yang diselesaikan dalam tahap Penuntutan	145 pkr	545pkr ^{K)}	Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pidana Khusus, Pelanggaran HAM Berat dan Perkara Tindak Pidana Korupsi	Kejaksaan Agung	19,0
3	Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi di Kejati, Kejari dan Cabjari.	Meningkatnya penyelesaian perkara tindak pidana korupsi secara cepat, tepat dan akuntabel yang dilaksanakan oleh jajaran Kejaksaan di daerah.	- Jumlah perkara tindak pidana korupsi yang diselesaikan oleh Kejati, Kejari dan Cabjari.	1700 pkr	7300 pkr ^{K)}	Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pidana Khusus, Pelanggaran HAM Berat dan Perkara Tindak Pidana Korupsi	Kejaksaan Agung	736,8
4	Pelayanan Penyusunan Peraturan Perundang – Undangan dan kerjasama hukum	Meningkatnya Pemberian pertimbangan hukum kepada satuan organisasi Kejaksaan dan instansi pemerintah, serta turut melakukan penelaahan dan penyusunan perumusan peraturan perundang-undangan dan pembinaan hubungan dengan lembaga negara, lembaga pemerintah dan lembaga lain baik di dalam maupun di luar negeri.	Jumlah kegiatan kerja sama hukum untuk penyusunan kesepakatan MLA rangka penelusuran dan pengembalian aset negara hasil tindak pidana korupsi yang disembunyikan diluar negeri.	7 keg	45 keg ^{K)}	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kejaksaan Agung	Kejaksaan Agung	8,6

BIDANG PEMBANGUNAN : HUKUM DAN APARATUR
PRIORITAS BIDANG : Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS / KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (HASIL OUTCOMES/OUTPUT) YANG DIHARAPKAN	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI PRIORITAS 2010-2014 (Rp. Miliar)
				2010	2014			
5	Penyelidikan Tindak Pidana Korupsi	Penyelidikan	Kasus Potensial (Kasus)	60	350 ^{K)}	Program Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	KPK	45,2
			Kasus Solid (Kasus)	28	185 ^{K)}			
6	Penyidikan Tindak Pidana Korupsi	Penyidikan	Penyidikan (Perkara)	55	325 ^{K)}	Program Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	KPK	44,9
			Penyidikan Lengkap (Perkara)	38	212 ^{K)}			
7	Penuntutan dan Eksekusi Tindak Pidana Korupsi	Penuntutan	Penuntutan (Perkara)	45	275 ^{K)}	Program Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	KPK	50,5
			Berkas Perkara yang diimpahkan ke Pengadilan Negeri (Perkara)	38	212 ^{K)}			
		Eksekusi	Pelaksanaan Pidana Badan (Persen)	100%	100%			
8	Koordinasi dan Supervisi Penindakan TPK	Korsup Penindakan	Peningkatan Perkara yang Disupervisi KPK (Persen)	100%	100%	Program Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	KPK	22,5
9	Pengelolaan LHKPN	Penanganan LHKPN	LHKPN yang Diumumkan dalam TBN (Jumlah Penyelenggara Negara)	21.000	17.000	Program Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	KPK	45,8
			Klarifikasi kepada Penyelenggara Negara	330	2160 ^{K)}			
			Kasus Diserahkan kepada Dit.Lidik (Jumlah)	3	21 ^{K)}			

BIDANG PEMBANGUNAN : HUKUM DAN APARATUR
PRIORITAS BIDANG : Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS / KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (HASIL OUTCOMES/OUTPUT) YANG DIHARAPKAN	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI PRIORITAS 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
10	Pengelolaan Gratifikasi	Penanganan Gratifikasi	Jumlah SK Penetapan Status Gratifikasi	300	1800 ^{K)}	Program Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	KPK	15,4
			Kasus Diserahkan kepada Dit.Lidik (Jumlah)	6	42 ^{K)}			
			Jumlah Instansi/Lembaga (Pem., BUMN dan Swasta) yang melaksanakan Program Pengendalian Anti Gratifikasi	2	30 ^{K)}			
11	Penyelenggaraan Pendidikan, Sosialisasi, dan Kampanye Anti Korupsi	Pendidikan, Sosialisasi, dan Kampanye	Jumlah Sekolah/Lembaga pendidikan yang menerapkan Modul Anti Korupsi	60	460 ^{K)}	Program Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	KPK	57,8
			Peningkatan Komunitas Anti Korupsi	15	100			
			Instansi/Lembaga (Pem. Swasta, Masy) yang Melaks. Zona Anti Korupsi (Jumlah)	10	95			
12.	Pengembangan kebijakan, koordinasi dan evaluasi pengawasan intern pemerintah	- Tersusunnya UU tentang Sistem Pengawasan Nasional dan peraturan pelaksanaannya - Tersusunnya kebijakan tentang Pakta Integritas bagi instansi pemerintah	- Jumlah undang-undang dan peraturan pelaksanaannya	-	1 UU, 3 Peraturan pelaksanaan, 1 Sosialisasi ^{K)}	Program Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Kemen PAN & RB	13,9
			- Jumlah Perpres tentang kebijakan/pedoman penerapan Pakta Integritas	-	1 ^{K)}			
13.	Pengembangan kebijakan, koordinasi, monitoring dan evaluasi percepatan pemberantasan korupsi	Tersusun dan terlaksananya kebijakan, koordinasi, monitoring dan evaluasi percepatan pemberantasan korupsi	- Jumlah peraturan/kebijakan (Inpres Percepatan Pemberantasan Korupsi)	1 Inpres	1 Inpres ^{K)}	Program Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Kemen PAN & RB	24,6
			- Persentase instansi pemerintah yang melaksanakan dan melaporkan Inpres Percepatan Pemberantasan Korupsi yang dievaluasi sesuai pedoman	60%	90%			

BIDANG PEMBANGUNAN : HUKUM DAN APARATUR
PRIORITAS BIDANG : Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS / KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (HASIL OUTCOMES/OUTPUT) YANG DIHARAPKAN	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI PRIORITAS 2010-2014 (Rp. Miliar)
				2010	2014			
14.	Pengembangan kebijakan, koordinasi dan evaluasi pengawasan masyarakat	Meningkatnya pengawasan masyarakat yang efektif dan efisien	Jumlah peraturan/kebijakan di bidang pengawasan masyarakat	1 kebijakan	1 kebijakan ^{K)}	Program Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Kemen PAN & RB	6,2
			Persentase laporan pengaduan masyarakat yang disalurkan dan telah ditindaklanjuti oleh instansi pemerintah	60%	90%			
15.	Pengendalian/pelaksanaan pengawasan intern akuntabilitas keuangan negara dan pembinaan penyelenggaraan SPIP Kementerian/Lembaga bidang fiskal dan investasi	- Terlaksananya pembinaan penyelenggaraan SPIP	- Jumlah Keputusan Kepala BPKP tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan SPIP	26	46 ^{K)}	Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	BPKP	61,6
			- Jumlah peserta diklat SPIP	1.650	5.700 ^{K)}			
			- Jumlah K/L dan Pemda yang mendapatkan sosialisasi SPIP	575	1035 ^{K)}			
			- Jumlah K/L dan Pemda yang mendapatkan konsultasi dan bimbingan teknis penyelenggaraan SPIP	116	655 ^{K)}			

BIDANG PEMBANGUNAN : HUKUM DAN APARATUR
PRIORITAS BIDANG : Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS / KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (HASIL OUTCOMES/OUTPUT) YANG DIHARAPKAN	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI PRIORITAS 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
16.	Pengembangan kebijakan penegakan integritas SDM aparatur	- Tersusunnya dan disempurnakannya aturan hukum yang mengatur penegakan integritas aparatur	- Jumlah PP tentang Disiplin PNS;	1	1, 2 sosialisasi ^{K)}	Program Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Kemen PAN & RB	9,0
			- Jumlah PP Larangan PNS menjadi anggota Parpol	-	1 ^{K)}			
			- Jumlah PP tentang Jiwa Korps dan Kode Etik PNS	-	1 ^{K)}			
			- Jumlah PP tentang Pembatasan Konflik Kepentingan	-	1 ^{K)}			
17.	Pelaksanaan dukungan perumusan kebijakan PAN	Tersusunnya kebijakan/ pedoman tentang budaya kerja "bersih, melayani, dan kompeten" di lingkungan aparatur negara. Terlaksananya kampanye budaya kerja kerja "bersih, melayani, dan kompeten" di lingkungan aparatur negara.	- Jumlah kebijakan/pedoman;	-	1 Perpres ^{K)}	Program Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Kemen PAN & RB	3,5
			- Persentase jumlah kampanye di media cetak dan elektronik	10%	100%			
			- Jumlah instansi Pemerintah yang menjadi <i>Pilot Project</i> pengembangan budaya kerja sesuai kebijakan	2	30 IP ^{K)}			
18.	Pengembangan sistem <i>e-procurement</i> nasional	Terfasilitasinya kementerian/ lembaga dan pemerintah daerah dalam penerapan <i>e-procurement</i>	- Jumlah instansi pemerintah yang difasilitasi <i>e-procurement</i>	25	160 ^{K)}	Program Pengembangan Sistem Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	LKPP	87,4
			- Persentase layanan <i>e-procurement</i> yang memenuhi standar	-	95%			

BIDANG PEMBANGUNAN : HUKUM DAN APARATUR
PRIORITAS BIDANG : Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS / KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (HASIL OUTCOMES/OUTPUT) YANG DIHARAPKAN	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI PRIORITAS 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
V	Fokus Prioritas 5: PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik	Skor Integritas Pelayanan Publik pada unit layanan di instansi Pusat	6,64	8,00			198,2
			Skor Integritas Pelayanan Publik pada unit layanan di instansi Daerah	6,46	8,00			
			Peringkat Kemudahan Berusaha (Doing Business Indeks)	122	75			
1.	Koordinasi perencanaan dan evaluasi program pelayanan publik	Tersusunnya peraturan pelaksanaan dari UU No. 25/2009 tentang Pelayanan Publik	- Jumlah PP	5	5 ^{K)}	Program Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Kemen PAN & RB	18,3
			- Jumlah Perpres	1	1 ^{K)}			
			- Persentase instansi yang telah mendapatkan sosialisasi	35%	100%			
2.	Pengawasan oleh Ombudsman Republik Indonesia terhadap penyelenggaraan pelayanan publik	Terlaksananya pengawasan pemberian pelayanan publik	Persentase jumlah laporan yang ditindaklanjuti ORI per laporan yang masuk	90%	92%	Program Dukungan Manajemen dan Penyelenggaraan Kegiatan Teknis Lainnya	Komisi Ombudsman Nasional	123,0
			Persentase respon terlapor per jumlah permintaan klarifikasi	70%	72%			
			Persentase rekomendasi yang dilaksanakan per jumlah rekomendasi yang dikeluarkan	85%	87%			

BIDANG PEMBANGUNAN : HUKUM DAN APARATUR
PRIORITAS BIDANG : Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS / KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (HASIL OUTCOMES/OUTPUT) YANG DIHARAPKAN	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI PRIORITAS 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
3.	Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknik manajemen dan kebijakan publik	Tersusunnya modul dan terselenggaranya diklat pelayanan publik	- Jumlah Peraturan Kepala LAN tentang Metode dan Modul Diklat Pelayanan Publik	-	1 ^{K)}	Program Pengkajian Administrasi Negara dan Diklat Aparatur Negara	LAN	1,9
			- Jumlah peserta diklat TOT pelayanan publik berbasis kinerja	0	400 org ^{K)}			
4.	Peningkatan koordinasi dan evaluasi pelayanan di bidang kesejahteraan sosial	Terlaksananya penilaian, monitoring dan evaluasi pelayanan publik	- Jumlah instrumen penilaian, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik	1	1 ^{K)}	Program Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Kemen PAN & RB	23,9
			- Laporan <i>movev</i> pelaksanaan penilaian pelayanan	-	4 ^{K)}			
		Tersusunnya kebijakan percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik	- Jumlah Inpres tentang percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik	1	1 ^{K)}			
		Terlaksananya asistensi untuk mendorong penerapan OSS/PTSP	- Persentase Pemerintah Daerah yang menerapkan OSS (pelayanan terpadu satu pintu)	70%	95%			
5.	Peningkatan koordinasi dan evaluasi pelayanan publik di bidang pemerintahan umum, hukum dan keamanan	Terlaksananya kompetisi antar unit pelayanan publik/ antar instansi dan Pemerintah Daerah	- Jumlah unit pelayanan yang dinilai berdasarkan usulan	150 unit	1250 unit ^{K)}	Program Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Kemen PAN & RB	23,6
			- Jumlah Pemda yang dinilai berdasarkan usulan Provinsi	100	550 Kab/Kota ^{K)}			
			- Persentase unit pelayanan/Pemda yang berkategori terbaik sesuai penilaian	50%	90%			
			- Persentase unit pelayanan/Pemda yang berkategori baik sesuai penilaian	50%	90%			

BIDANG PEMBANGUNAN : HUKUM DAN APARATUR
PRIORITAS BIDANG : Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS / KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (HASIL OUTCOMES/OUTPUT) YANG DIHARAPKAN	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI PRIORITAS 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
6.	Penetapan indikator kinerja utama pelayanan Publik yang selaras antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah	Tersusunnya SPM di bidang lainnya yang belum terbit sampai akhir tahun 2009	- Jumlah SPM yang ditetapkan	13 SPM	17 SPM	Program Pengelolaan Desentralisasi dan Otonomi Daerah	Kemendagri	7,5
VI.	Fokus Prioritas 6: PENINGKATAN KAPASITAS DAN AKUNTABILITAS KINERJA BIROKRASI	Meningkatnya kapasitas birokrasi dan akuntabilitas instansi pemerintah	Indeks Efektivitas Pemerintahan (dari skala -2,5 sd 2,5)	-0,29	0,5		Kemen PAN & RB	354,0
			Persentase Instansi Pemerintah yang dinilai akuntabel (%)	24	80			
1.	Koordinasi perencanaan dan evaluasi program kelembagaan	- Terlaksananya konsolidasi struktural dan peningkatan kapasitas Kemeneg PAN dan RB, LAN, dan BKN - Terlaksananya penataan kelembagaan instansi pemerintah lainnya	- Persentase penyelesaian konsolidasi struktural dan peningkatan kapasitas Kemeneg PAN & RB, BKN, LAN	100%	100%	Program Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Kemen PAN & RB	5,1
			- Persentase instansi pemerintah (PPK-BLU) yang telah tertata kelembagaannya	20%	100%			
			- Persentase LNS yang telah tertata organisasi dan tata kerjanya	20%	100%			

BIDANG PEMBANGUNAN : HUKUM DAN APARATUR
PRIORITAS BIDANG : Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS / KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (HASIL OUTCOMES/OUTPUT) YANG DIHARAPKAN	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI PRIORITAS 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
2.	Pengembangan kebijakan, koordinasi dan evaluasi kelembagaan polhukam	Terlaksananya penataan kelembagaan instansi pemerintah lainnya, bidang polhukhankam	<ul style="list-style-type: none"> - Persentase Kementerian Negara bidang polhukam yang telah tertata organisasi dan tata kerjanya (antara lain Kemen. Setneg) - Persentase LPNK bidang polhukam yang telah tertata organisasi dan tata kerjanya, terutama bidang pemanfaatan tanah dan penataan ruang bagi kepentingan rakyat (BPN) - Persentase Sekretariat Lembaga Negara yang telah tertata organisasi dan tata kerjanya 	20%	100%	Program Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Kemen PAN & RB	5,2
3.	Pengembangan kebijakan, koordinasi dan evaluasi kelembagaan perekonomian I	Terlaksananya penataan kelembagaan instansi pemerintah lainnya, bidang perekonomian I	<ul style="list-style-type: none"> - Persentase Kementerian Negara bidang perekonomian I yang telah tertata organisasi dan tata kerjanya, terutama bidang penguatan keberdayaan UKMK (Kemeneq UKMK, Kemen. Perindustrian, Kemen. Perdagangan), pemanfaatan sumber daya kelautan (Kemen. Kelautan dan Perikanan), pemanfaatan tanah dan penataan ruang bagi kepentingan rakyat (Kemen. PU, Kemen. Kehutanan) dan Kemeneq PPN) 	20%	100%	Program Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Kemen PAN & RB	12,0

BIDANG PEMBANGUNAN : HUKUM DAN APARATUR
PRIORITAS BIDANG : Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS / KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (HASIL OUTCOMES/OUTPUT) YANG DIHARAPKAN	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI PRIORITAS 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
			- Persentase LPNK bidang perekonomian I yang telah tertata organisasi dan tata kerjanya	20%	100%			
			- Persentase Perwakilan RI yang telah tertata organisasi dan tata kerjanya	20%	100%			
4.	Pengembangan kebijakan, koordinasi dan evaluasi kelembagaan perekonomian II	Terlaksananya penataan kelembagaan instansi pemerintah lainnya, bidang perekonomian II	- Persentase Kementerian Negara bidang perekonomian II yang telah tertata organisasi dan tata kerjanya, terutama bidang pengelolaan energi (Kemen. ESDM, restrukturisasi BUMN (Kemeneg BUMN), pemanfaatan tanah dan penataan ruang bagi kepentingan rakyat (Kemen. Pertanian) dan Kemeneg. Ristek)	20%	100%	Program Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Kemen PAN & RB	3,7
			- Persentase LPNK bidang perekonomian II yang telah tertata organisasi dan tata kerjanya	20%	100%			
5.	Pengembangan kebijakan, koordinasi dan evaluasi kelembagaan kesra	Terlaksananya penataan kelembagaan instansi pemerintah lainnya, bidang kesra	- Persentase Kementerian Negara bidang kesra yang telah tertata organisasi dan tata kerjanya (antara lain Kemendiknas)	20%	100%	Program Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Kemen PAN & RB	3,4
			- Persentase LPNK bidang kesra yang telah tertata organisasi dan tata kerjanya	20%	100%			
			- Persentase Pemda yang dievaluasi organisasi dan tatakerjanya	20%	100%			

BIDANG PEMBANGUNAN : HUKUM DAN APARATUR
PRIORITAS BIDANG : Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS / KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (HASIL OUTCOMES/OUTPUT) YANG DIHARAPKAN	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI PRIORITAS 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
6.	Pengembangan kebijakan, koordinasi dan evaluasi tata laksana perekonomian	Tersusunnya kebijakan tentang administrasi pemerintahan	Jumlah UU, peraturan pelaksanaan dan sosialisasinya		1 UU, 2 PP 2 sosialisasi ^{K)}	Program Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Kemen PAN & RB	18,5
7.	Pengembangan kebijakan, koordinasi dan evaluasi tata laksana korporatisasi	- Tersusunnya kebijakan tentang etika penyelenggara negara	Jumlah UU, peraturan pelaksanaan dan sosialisasinya	1 RUU	1 RUU 1 UU 3 PP 3 sosialisasi ^{K)}	Program Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Kemen PAN & RB	12,9
8.	Peningkatan layanan hukum, pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan, dan pengelolaan pegawai di lingkungan ANRI	Tersusunnya peraturan pelaksanaan dari UU No.43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	- Jumlah PP	4 PP	7 PP ^{K)}	Program Dukungan Manajemen dan Penyelenggaraan Tugas Teknis Lainnya	ANRI	7,0
			- Jumlah Inpres	1 Inpres	1 Inpres ^{K)}			
			- Jumlah Perka. ANRI	1 Perka ANRI	52 Perka ANRI ^{K)}			
9.	Pembinaan kearsipan pusat	Terlaksananya penerapan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (SIKD-TIK)	- Jumlah instansi pusat (IP) yang sudah menerapkan SIKD-TIK	10	30 ^{K)}	Program Penyelenggaraan Kearsipan Nasional	ANRI	11,4
10.	Pengembangan kebijakan pematapan pengembangan SDM aparatur	- Tersusunnya kebijakan tentang manajemen kepegawaian (<i>UU tentang SDM Aparatur Negara</i>) - Tersusunnya kebijakan tentang pola dasar karir PNS - Tersusunnya kebijakan tentang penilaian kinerja pegawai (<i>SKP</i>)	- Jumlah UU dan peraturan pelaksanaannya	-	1 RUU ^{K)} 1 UU dan peraturan pelaksanaannya 2 sosialisasi	Program Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Kemen PAN & RB	11,3
			- Jumlah Perpres	1 Perpres	1 Perpres ^{K)} 1 sosialisasi			
			- Jumlah PP	1 PP	1 PP ^{K)}			

BIDANG PEMBANGUNAN : HUKUM DAN APARATUR
PRIORITAS BIDANG : Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS / KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (HASIL OUTCOMES/OUTPUT) YANG DIHARAPKAN	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI PRIORITAS 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
		- Tersusunnya kebijakan tentang penilaian, pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural	Jumlah Perpres	1 Perpres	1 Perpres ^{K)}			
		- Tersusunnya kebijakan diklat jabatan PNS	Jumlah PP	-	1 PP ^{K)}			
		- Tersusunnya kebijakan tentang pengangkatan PNS dalam jabatan struktural	Jumlah PP	-	1 PP ^{K)}			
11.	Pengembangan kebijakan kesejahteraan SDM aparatur	- Tersusunnya kebijakan (UU/PP) tentang remunerasi dan tunjangan kinerja Pegawai Negeri - Tersusunnya kebijakan sistem pensiun PNS - Tersusunnya kebijakan tentang sistem pengelolaan dana pensiun PNS	- Jumlah UU/PP tentang remunerasi/tunjangan kinerja Pegawai Negeri; - Jumlah UU/PP tentang pensiun PNS - Jumlah kebijakan tentang pengelolaan dana pensiun PNS	1 UU/PP	1 UU/PP ^{K)} 1 UU/PP ^{K)} 1 PP ^{K)}	Program Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Kemen PAN & RB	16,3
12.	Penyusunan kebijakan perencanaan SDM aparatur	- Tersusunnya kebijakan (PP) tentang sistem pengadaan /rekrutmen dan Seleksi PNS - Tersusunnya kebijakan (PP) tentang Kebutuhan Pegawai (Formasi)	Jumlah PP Jumlah PP	1 PP 1 PP	1 PP, 2 sosialisasi ^{K)} 1 PP ^{K)}	Program Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Kemen PAN & RB	20,1
13.	Pembangunan, pengembangan sistem informasi dan pengolahan data kepegawain	- Terbangunnya sistem informasi kepegawain yang terpadu - Terbangunnya database kepegawain yang lengkap, akurat, dan terkini	- Persentase berfungsinya sistem informasi kepegawain nasional - Persentase tingkat keakuratan data kepegawain yang disajikan BKN	25% 25%	100% 100%	Program Penyelenggaraan Manajemen Kepegawain Negara	BKN	174,8
14.	Peningkatan kualitas pembinaan pendidikan dan pelatihan aparatur	Terbangunnya sistem diklat aparatur pola baru	- Jumlah juknis dan Pedoman kediklatan - Jumlah modul diklat - Laporan sosialisasi pembaharuan sistem diklat pola baru.	- 1 modul -	1 SK Kepala LAN ^{K)} 1 modul ^{K)} 2 laporan ^{K)}	Program Pengkajian Administrasi Negara dan Diklat Aparatur Negara	LAN	9,0

BIDANG PEMBANGUNAN : HUKUM DAN APARATUR
PRIORITAS BIDANG : Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS / KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (HASIL OUTCOMES/OUTPUT) YANG DIHARAPKAN	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI PRIORITAS 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
			- Laporan hasil revitalisasi SIDA	-	2 laporan ^{K)}			
			- Laporan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan diklat.	1 laporan	2 laporan ^{K)}			
15.	Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kepemimpinan tingkat I, II, III dan IV	Terselenggaranya diklat kepemimpinan tingkat I	- Jumlah peserta diklat kepemimpinan tingkat I	60 org	300 org ^{K)}	Program Pengkajian Administrasi Negara dan Diklat Aparatur Negara	LAN	11,7
16.	Pengkajian kinerja sumber daya aparatur	Tersusunnya kebijakan magang bagi calon pemimpin aparatur negara pada institusi bertaraf internasional	- Jumlah kebijakan tentang magang bagi calon pemimpin aparatur negara	-	1 Kebijakan ^{K)}	Program Pengkajian Administrasi Negara dan Diklat Aparatur Negara	LAN	1,2
			- Jumlah laporan <i>review</i> kebijakan magang	-	1 laporan ^{K)}			
17.	Pengembangan sistem akuntabilitas kinerja aparatur negara	- Tersusun dan tersosialisasinya Undang-undang Akuntabilitas Penyelenggara Negara dan peraturan pelaksanaannya	- Jumlah UU dan peraturan pelaksanaannya	-	1 RUU, 1 UU, ^{K)} 2 PP 2 sosialisasi	Program Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Kemen PAN & RB	12,8
		- Tersusunnya kebijakan/pedoman pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja (termasuk penerapan sistem <i>reward and punishment</i> bagi kinerja instansi pemerintah, penerapan kontrak kinerja pada setiap jabatan aparatur negara)	- Jumlah kebijakan/pedoman	-	1 Kebijakan ^{K)} 4 Pedoman			

BIDANG PEMBANGUNAN : HUKUM DAN APARATUR

PRIORITAS BIDANG : Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS / KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (HASIL OUTCOMES/OUTPUT) YANG DIHARAPKAN	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI PRIORITAS 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
18.	Evaluasi akuntabilitas kinerja aparatur dan penilaian kinerja aparatur	Terlaksananya pemantauan dan evaluasi penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	- Persentase Instansi pemerintah yang akuntabilitas kerjanya baik	40%	55%	Program Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Kemen PAN & RB	8,7
19.	Pembinaan penerapan sistem akuntabilitas kinerja aparatur	Terlaksananya penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	- Persentase instansi yang menerapkan sistem akuntabilitas kinerja	45%	80%	Program Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Kemen PAN & RB	9,2
VII	Fokus Prioritas 7: PEMANTAPAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI INSTANSI	Terlaksananya reformasi birokrasi instansi secara terencana, sistematis, dan komprehensif	Jumlah K/L yang telah melaksanakan reformasi birokrasi sesuai dengan kebijakan nasional	17 KL	75 KL			69,2
			Tingkat kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi yang terukur sesuai dengan kebijakan nasional	70%	100%			
			Tingkat penanganan dampak dan pengukuran manfaat reformasi birokrasi	70%	100%			

BIDANG PEMBANGUNAN : HUKUM DAN APARATUR
PRIORITAS BIDANG : Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS / KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (HASIL OUTCOMES/OUTPUT) YANG DIHARAPKAN	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI PRIORITAS 2010-2014 (Rp. Miliar)
				2010	2014			
1.	Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan reformasi birokrasi	Meningkatnya koordinasi penyusunan kebijakan dan pelaksanaan reformasi birokrasi	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi yang diterbitkan (<i>grand design</i> RBN dan kebijakan pelaksanaannya) - Tingkat kualitas pelaksanaan RB yg terukur sesuai dengan kebijakan RB Nasional - Persentase instansi yang menerima sosialisasi - Persentase instansi pusat dan daerah yang dilakukan konsultasi asistensi reformasi birokrasi - Jumlah laporan monitoring dan evaluasi - Persentase K/L yang telah melaksanakan Reformasi Birokrasi sesuai kebijakan nasional 	<ul style="list-style-type: none"> 100% 70% 100% K/L 30% Pemda 100% K/L, 10% Pemda 4 laporan triwulanan 20% 	<ul style="list-style-type: none"> 100% 100% 100% Pemda 100% Pemda 20 laporan ^{KI} triwulanan 100% 	Program Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Kemen PAN & RB	62,7

BIDANG PEMBANGUNAN : HUKUM DAN APARATUR
PRIORITAS BIDANG : Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS / KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (HASIL OUTCOMES/OUTPUT) YANG DIHARAPKAN	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI PRIORITAS 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
2.	Perencanaan kepegawaian dan formasi	- Tersusunnya kebijakan realokasi/distribusi pegawai dan pelaksanaannya	- Jumlah petunjuk teknis penataan kepegawaian sebagai dampak pelaksanaan reformasi birokrasi	-	1 Perka BKN	Program Penyelenggaraan Manajemen Kepegawaian Negara	BKN	4,8
			- Persentase jumlah pegawai yang telah tertangani statusnya sebagai dampak reformasi birokrasi	-	80%			
		- Tersusunnya kebijakan <i>right sizing</i> kepegawaian	- Jumlah kebijakan tentang <i>right sizing</i> kepegawaian	-	1 Perka BKN ^{K)}			
3.	Pengkajian manajemen kebijakan	Tersusunnya kebijakan penyelenggaraan diklat bagi upaya penanganan dampak reformasi birokrasi instansi	Jumlah petunjuk teknis tentang penyelenggaraan diklat bagi upaya penanganan dampak reformasi birokrasi instansi	-	1 Kajian, ^{K)} 1 Perka LAN	Program Pengkajian Administrasi Negara dan Diklat Aparatur Negara	LAN	1,8
TOTAL								13.267,6

KETERANGAN :

K) Angka kumulatif 5 tahun (2010-2014)



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2010
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH NASIONAL
(RPJMN)
TAHUN 2010--2014**

**BUKU II
MEMPERKUAT SINERGI ANTARBIDANG PEMBANGUNAN**

**BAB IX
WILAYAH DAN TATA RUANG**

**Diperbanyak Oleh:
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS)
2010**

9.2.2.5	Perdesaan.....	II.9-77
9.2.2.6	Ekonomi Lokal dan Daerah	II.9-78
9.2.2.7	Kawasan Strategis	II.9-79
9.2.2.8	Kawasan Perbatasan	II.9-79
9.2.2.9	Daerah Tertinggal.....	II.9-79
9.2.2.10	Kawasan Rawan Bencana.....	II.9-80
9.2.2.11	Desentralisasi, Hubungan Pusat Daerah, dan Antardaerah	II.9-80
9.2.2.12	Tata Kelola dan Kapasitas Pemerintahan Daerah.....	II.9-80
9.3	Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan	II.9-81
9.3.1	Pembangunan Data dan Informasi Spasial	II.9-83
9.3.2	Penyelenggaraan Penataan Ruang	II.9-84
9.3.3	Reforma Agraria	II.9-85
9.3.4	Pembangunan Perkotaan	II.9-88
9.3.5	Pembangunan Perdesaan	II.9-90
9.3.6	Pengembangan Ekonomi Lokal dan Daerah.....	II.9-94
9.3.7	Pengembangan Kawasan Strategis.....	II.9-96
9.3.8	Pengembangan Kawasan Perbatasan	II.9-98
9.3.9	Pembangunan Daerah Tertinggal	II.9-100
9.3.10	Penanggulangan Bencana dan Pengurangan Resiko Bencana	II.9-102
9.3.11	Pemantapan Desentralisasi, Peningkatan Kualitas Hubungan Pusat Daerah dan Antardaerah	II.9-105
9.3.12	Perbaikan Tata Kelola dan Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Daerah	II.9-106



BAB IX

WILAYAH DAN TATA RUANG

Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan kesatuan wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, dan berupa negara kepulauan yang luas dan terdiri dari belasan ribu pulau besar dan kecil yang terbentang dari Sabang hingga Merauke yang menjadikan Indonesia memiliki nilai strategis. Letaknya yang berada di antara dua lempeng yaitu lempeng Australia dan Eurasia juga menjadikan Indonesia memiliki kerentanan akan bencana. Selain itu, Indonesia memiliki keberagaman yang tinggi antarwilayah seperti keberagaman dalam kualitas dan kuantitas sumber daya alam, kondisi geografi dan demografi, agama, serta kehidupan sosial budaya dan ekonomi, sehingga dalam penyelenggaraan pembangunan nasional harus memperhatikan dimensi kewilayahan tersebut. Pentingnya aspek kewilayahan dalam pembangunan nasional di Indonesia diisyaratkan dalam UU No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005—2025 yang mengamanatkan bahwa aspek spasial haruslah diintegrasikan ke dalam kerangka perencanaan pembangunan, dan juga dalam UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang mengamanatkan pentingnya integrasi dan keterpaduan antara Rencana Pembangunan dengan Rencana Tata Ruang di semua tingkatan pemerintahan.

Dalam tahap kedua RPJPN diamanatkan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010—2014 ditujukan untuk memantapkan penataan kembali NKRI, meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM), membangun kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) dan memperkuat daya saing perekonomian. Dalam bidang wilayah dan tata ruang hal ini ditandai oleh terwujudnya kehidupan bangsa yang lebih demokratis yang diindikasikan dengan membaiknya pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah; kualitas pelayanan publik yang lebih murah, cepat, transparan dan akuntabel makin meningkat dengan terpenuhinya standar pelayanan minimal (SPM) di semua tingkatan pemerintahan; kesejahteraan rakyat terus meningkat yang ditunjukkan oleh membaiknya berbagai indikator pembangunan, menurunnya kesenjangan kesejahteraan antarindividu, antarkelompok masyarakat dan antardaerah, dipercepatnya pengembangan pusat-pusat pertumbuhan potensial di luar Jawa; mantapnya kelembagaan dan kapasitas antisipatif serta penanggulangan bencana di setiap tingkatan pemerintahan; dan meningkatnya kualitas perencanaan tata ruang serta konsistensi pemanfaatan ruang dengan mengintegrasikannya ke dalam dokumen perencanaan pembangunan terkait dan penegakan peraturan dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang.

Kesenjangan antarwilayah masih merupakan isu strategis yang menonjol dalam pembangunan wilayah dalam 5 (lima) tahun ke depan. Walaupun laju pertumbuhan

ekonomi nasional tahun 2005-2008 cukup signifikan, yaitu dari sebesar 5,6 persen pada tahun 2005 meningkat menjadi 6,36 persen pada tahun 2008, kesenjangan antarwilayah masih terlihat dari intensitas kegiatan ekonomi yang masih terpusat di Jawa dan Bali. Kontribusi provinsi-provinsi di Pulau Jawa dan Bali terhadap total perekonomian nasional (termasuk migas), adalah 64,78 persen, sedangkan wilayah Sumatera 20,44 persen, Sulawesi 6 persen, Kalimantan 6 persen, dan Papua, Kepulauan Maluku serta Kepulauan Nusa Tenggara masing-masing kurang dari 2 persen. Kesenjangan ekonomi juga terjadi antarkabupaten/kota yang di Provinsi Jawa Barat, misalnya kabupaten/kota yang memiliki kontribusi terbesar terhadap PDRB Provinsi Jawa Barat adalah kabupaten/kota adalah Bekasi, Bogor, dan Bandung, dengan rata-rata kontribusi masing-masing sebesar di atas 9,1 persen terhadap total PDRB provinsi, dibandingkan dengan wilayah kabupaten/kota lain yang berkontribusi kurang dari 3 persen.

Kesenjangan antarwilayah juga terlihat dari aspek sosial. Dari nilai indeks pembangunan manusia (IPM), IPM tertinggi dijumpai di provinsi-provinsi di Pulau Jawa-Bali, yaitu tertinggi Provinsi DKI Jakarta yang mencapai 76.3, sedangkan terendah ditemukan di provinsi-provinsi di luar Pulau Jawa, yaitu di Provinsi Papua dengan IPM sebesar 62,8. Selain itu, masyarakat di luar Pulau Jawa, terutama wilayah Papua, Maluku, Nusa Tenggara, Sulawesi dan Kalimantan masih menghadapi permasalahan dalam pemenuhan hak-hak dasar rakyat terutama pangan dan gizi, perbaikan layanan kesehatan dan pendidikan, pengurangan pengangguran dan kemiskinan, pengurangan kasus pembalakan hutan dan pencurian ikan, serta pencegahan kerusakan lingkungan.

Pembangunan nasional berdimensi kewilayahan bertujuan untuk mengurangi kesenjangan antarwilayah terdiri dari beberapa unsur yang saling melengkapi satu sama lain, yang mencakup: data dan informasi spasial, penataan ruang, pertanahan, perkotaan, perdesaan, ekonomi lokal dan daerah, kawasan strategis, kawasan perbatasan, daerah tertinggal, kawasan rawan bencana, desentralisasi, hubungan pusat daerah, dan antar daerah serta tata kelola dan kapasitas pemerintahan daerah.

9.1 Kondisi Umum

9.1.1 Data dan Informasi Spasial

UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional telah mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan harus didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan yang mencakup pengertian gambar visual (*images*) yang diperoleh baik melalui observasi langsung maupun dari yang sudah terkumpul, yang salah satu komponen terpenting di dalamnya adalah data dan informasi spasial.

Sistem informasi geografis (SIG) dalam meningkatkan kualitas perencanaan, perumusan kebijakan publik, dan analisis kewilayahan semakin besar baik di



pemerintah maupun swasta. Agar dapat dihasilkan analisis yang mendalam, SIG perlu dilengkapi dengan data-data digital yang berkualitas, yang didasarkan pada pengumpulan data yang tidak tumpang tindih, mudah diakses oleh pihak lain, sistem dokumentasi yang baik, dalam format yang kompatibel satu dengan lainnya, dan sistem jaringan yang didukung oleh data standar.

Upaya melakukan konsolidasi data dan informasi spasial telah dimulai dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres) No. 85 Tahun 2007 tentang Jaringan Data Spasial Nasional (JDSN). Peraturan Presiden ini dimaksudkan untuk mewujudkan sebuah sistem yang dapat memfasilitasi dan mengakomodasi kerjasama semua instansi pembuat dan pengguna data dalam pengumpulan, pengolahan, pemeliharaan, penyimpanan dan penyebarluasan data dan informasi spasial. Pembangunan JDSN ditujukan untuk menyediakan data spasial yang berkualitas, mudah diakses, dan mudah diintegrasikan untuk keperluan pembangunan nasional. Pada tahap awal telah dirintis pembangunan jaringan data dan informasi spasial terkoneksi pada 14 instansi pemerintah pusat. Pembangunan jaringan tersebut secara bertahap akan melingkupi seluruh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.

Untuk memenuhi kebutuhan nasional dalam menyusun perencanaan pembangunan saat ini, telah tersedia data dan informasi spasial yang telah dihasilkan oleh beberapa instansi pusat, antara lain, sebagai berikut.

1. Kerangka Dasar dan Data Dasar Perpetaan:

- a. Kerangka Dasar Perpetaan meliputi: Jaring Kontrol Horisontal (JKH), Jaring Kontrol Vertikal (JKV), Jaring Kontrol Geodinamik (JKG), Stasiun Tetap GPS untuk *Indonesian Tsunami Early Warning System* (ITEWS) dan stasiun *Continues Operating Reference System* (CORS), Jaring Kontrol Gaya Berat (JKGB), Stasiun Pasang Surut Laut Nasional, dan Jaring Kontrol Batas Wilayah (geo-referensi batas wilayah internasional dan daerah);
- b. Data Dasar Perpetaan meliputi: citra *landsat*, foto udara (hitam putih dan berwarna), citra *Interferometric Syntetic Apperture Radar* (IFSAR), data dasar *bathymetri*, dan foto udara pulau-pulau kecil terdepan.

2. Peta Dasar:

- a. Peta Rupa bumi Indonesia meliputi: skala 1:250.000, skala 1:50.000, skala 1:25.000, skala 1:10.000, dan skala 1:5.000. Sepanjang tahun 2005—2008 peta dasar rupa bumi Indonesia telah terdistribusi sebanyak 292.504 NLP kepada para lintas pelaku baik institusi pemerintah pusat, daerah, swasta nasional maupun asing;
- b. Peta Dasar Kelautan meliputi Peta Lingkungan Pantai Indonesia (LPI) skala 1:250.000, Peta Lingkungan Pantai Indonesia (LPI) skala 1:50.000, Peta Lingkungan Laut Nasional (LLN) skala 1:500.000, Peta Zona Ekonomi

Eksklusif (ZEE) skala 1:1.000.000, Peta Garis Pangkal skala 1:200.000 telah selesai 100 persen;

- c. Peta Dasar Kedirgantaraan yang telah dihasilkan sampai saat ini meliputi: World Aeronautical Chart (WAC) skala 1:1.000.000, Aeronautical Chart (AC) skala 1:250.000, dan Peta Lingkungan Bandara Indonesia (LBI) skala 1:25.000.

3. Data dan Informasi Tematik dengan Tema Pokok, seperti:

- a. Peta Tematik Darat yang telah dihasilkan sampai saat ini meliputi: (i) skala 1:2.500.000 meliputi tema: Potensi Kawasan Lindung, Ekosistem, Geomorfologi, Kawasan Konservasi, Lahan Kritis, Risiko Bencana Alam, dan Lahan Basah; (ii) skala 1:1.000.000 sebanyak 36 NLP (seluruh Indonesia), meliputi tema: Neraca Sumber Daya Lahan, Neraca Sumber Daya Hutan, Neraca Sumber Daya Air, Neraca Sumber Daya Mineral, Integrasi Neraca Sumber Daya Alam, dan Liputan Lahan; (iii) skala 1:250.000 meliputi tema: Liputan Lahan, Sistem Lahan, Ekosistem Daerah Aliran Sungai (DAS), Aktiva Sumberdaya Air DAS Bengawan Solo, Potensi Lahan, Rawan Banjir, Sumber Daya Air, Potensi Sumber Daya Air, Ekosistem, Aktiva Sumberdaya Mineral, dan Neraca Sumberdaya Hutan; (iv) skala 1:50.000 meliputi tema: Liputan Lahan, Bentuk Lahan, Kerapatan Aliran, Potensi Kawasan Lindung, Potensi Wilayah Perbatasan, Ekosistem Daerah Aliran Sungai; (v) skala 1:25.000 meliputi tema: Bentuk Lahan, Ekosistem Karst, Potensi Kawasan Lindung, dan Lahan Terbaharui; (vi) Peta Tematik lainnya, terdiri atas: Kerangka Dasar Kadastral, Bidang Tanah, Penggunaan Tanah, Zona Nilai Tanah, Zona Nilai Aset Kawasan, Karakteristik Tanah, Transportasi, Wilayah Kode Pos, Jaringan Jalan, Tubuh Air/Hidrologi, Lingkungan Bangunan, Jaringan Air Bersih, Instalasi Pengolahan Limbah, Rencana Tata Ruang, Lingkungan Budaya, Wilayah Pengumpulan Data Statistik, Hasil Kegiatan Statistik, Kuasa Pertambangan, Geologi, Sumber Daya Mineral, Seismik Eksplorasi, Gaya Berat, Geomagnet, Logging Sumur Pemboran, Hidrogeologi, Kawasan Hutan, Keanekaragaman Hayati, Klasifikasi Tanah, Iklim, dan Geofisika;
- b. Peta Tematik Kelautan yang telah dihasilkan meliputi: (i) Skala 1:1.000.000 terdiri atas tema: Liputan Lahan Pesisir, Bentuk Lahan Pesisir, Neraca Terumbu Karang, Neraca Mineral Lepas Pantai, Neraca Penggunaan Lahan pesisir, Kawasan Pesisir Indonesia, serta Neraca dan Valuasi Ekonomi Mangrove; (ii) Skala 1:250.000 terdiri atas tema: Geologi Pantai, Lereng, Geomorfologi, Liputan Lahan Pesisir, Bentuk Lahan Pesisir Wilayah Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI)-II, Sebaran Mangrove sebanyak 4 NLP, Sebaran Terumbu Karang, Peta Suhu Permukaan Laut Wilayah ALKI II, serta Neraca Sumber Daya Pesisir dan Laut; (iii) Skala 1:50.000 terdiri atas tema: Peta Liputan Lahan Pesisir, Bentuk Lahan Pesisir, Sebaran Ikan Karang,

Sebaran Mangrove, Neraca Mangrove dan Terumbu Karang, serta Neraca Valuasi Ekonomi Terumbu Karang dan Ikan; dan (iv) Peta Tematik Lainnya, terdiri atas: Oseanografi;

- c. Peta Tematik Batas Wilayah yang telah dihasilkan meliputi: (i) Peta Batas Negara Darat (RI-PNG skala 1:50.000 dan 1:25.000; RI-Malaysia skala 1:50.000, skala 1:10.000, skala 1:2.500 dan 1:5.000; RI-RDTL skala 1:50.000 dan 1:25.000); (ii) Peta Batas Wilayah Daerah Otonom Provinsi dan Kabupaten/Kota; (iii) Mosaik Peta Pulau-pulau Terluar skala 1:10.000; dan (iv) Peta NKRI skala 1:5.000.000;
- d. Atlas meliputi: (i) Atlas Sumberdaya berupa: Global Mapping, Atlas Elektronik Sumberdaya, dan Atlas Sumberdaya Nasional; (ii) Atlas Publik berupa: Peta Dinding Provinsi dan Indonesia, Peta Dinding Benua dan Dunia, Peta Dinding Kota dan Kabupaten, Peta Dinding Pulau, Atlas Pariwisata, Atlas Pariwisata From Space, Atlas Multimedia, Atlas Travelling, Atlas Wilayah Perbatasan, Atlas Pulau-pulau Kecil, dan Atlas Tsunami Aceh;
- e. Toponimi meliputi: (i) skala 1:25.000 wilayah Jawa dan Bali; (ii) skala 1:50.000 wilayah Sulawesi, Nusa Tenggara, Kalimantan, dan Sumatera.

9.1.2 Penataan Ruang

Penyelenggaraan penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional dengan: (i) terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan, (ii) terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia, (iii) terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang. Selain itu, penataan ruang juga harus berbasis mitigasi bencana sebagai upaya dalam meningkatkan keselamatan dan kenyamanan hidup dengan pengaturan zonasi yang baik.

Dalam melaksanakan penyelenggaraan penataan ruang yang meliputi kegiatan pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang, perlu dilakukan penyusunan, sinkronisasi, dan sosialisasi peraturan perundang-undangan pelaksanaan serta berbagai pedoman teknisnya. Beberapa peraturan perundang-undangan pelaksanaan yang telah disusun hingga tahun 2009 adalah Peraturan Pemerintah (PP) No. 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) dan Peraturan Presiden (Perpres) No. 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak dan Cianjur (Jabodetabekpunjur). Sementara itu, beberapa peraturan perundang-undangan lainnya masih dalam proses penyelesaian, yaitu Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, RPP tentang Sumber Daya Alam, RPP tentang Tata Cara dan Bentuk Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang, RPP tentang Tingkat Ketelitian Peta

Rencana Tata Ruang, dan RPP tentang Penataan Ruang Kawasan Pertahanan. Selain itu, Rancangan Peraturan Presiden (Raperpres) yang sedang diselesaikan adalah Raperpres Rencana Tata Ruang (RTR) Pulau yaitu RTR Pulau Sumatera, RTR Pulau Jawa-Bali, RTR Pulau Kalimantan, RTR Pulau Sulawesi, RTR Pulau Papua, RTR Kepulauan Maluku, dan RTR Kepulauan Nusa Tenggara.

UU No. 26 Tahun 2007 juga mengamanatkan kepada pemerintah daerah untuk segera melakukan revisi Peraturan Daerah (Perda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi, Kota dan Kabupaten dengan batas waktu 2 tahun (untuk Provinsi) dan 3 tahun (untuk Kabupaten dan Kota) sejak UU tersebut diterbitkan. Hingga akhir tahun 2009 telah ada 2 (dua) provinsi dan 7 (tujuh) kabupaten/kota yang menetapkan Perda RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota dan disesuaikan dengan UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan PP No. 26 Tahun 2008 tentang RTRWN.

Untuk meningkatkan kualitas produk penataan ruang, telah disusun norma, standar, pedoman dan kriteria (NSPK) yang meliputi, antara lain: Pedoman Penyusunan RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota, Pedoman Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Penataan Ruang, dan Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Wilayah Kota/Perkotaan, sedangkan NSPK lainnya masih dalam proses penyusunan.

Dalam mendukung pelaksanaan penataan ruang yang baik, diperlukan peta sebagai alat untuk memudahkan interpretasi spasial. Hingga akhir tahun 2009, peta rupa bumi telah tersedia untuk seluruh Indonesia pada skala 1: 250.000, sedangkan untuk skala 1:50.000 hingga 25.000 baru tersedia untuk Pulau Jawa. Secara bertahap, ketersediaan data spasial yang akurat terus dilakukan dan untuk mendukung pengembangan sistem informasi penataan ruang, saat ini telah disahkan Perpres No. 85 Tahun 2007 tentang Jaringan Data Spasial Nasional yang merupakan pedoman dalam pembuatan peta dan penyediaan sistem informasi di bidang data spasial.

Kelembagaan dalam bidang penataan ruang diperlukan untuk menunjang penyelenggaraan penataan ruang. Sejak ditetapkannya UU No. 26 Tahun 2007, kelembagaan penataan ruang baik di tingkat pusat maupun daerah menjadi prasyarat bagi tercapainya tujuan penataan ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Salah satu fungsi kelembagaan yang perlu diperkuat adalah koordinasi antara berbagai instansi terkait. Di tingkat pusat, koordinasi dilaksanakan oleh Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional (BKPRN) sesuai dengan Keppres No. 4 Tahun 2009 tentang Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional, sedangkan di tingkat daerah koordinasi dilaksanakan oleh Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) sesuai dengan Kepmendagri No. 50 Tahun 2009 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah. Meskipun demikian, kelembagaan tidak hanya dilihat dari isu koordinasi, tetapi juga mempertimbangkan aspek kapasitas sumber daya yang dimiliki lembaga, komitmen dalam pelaksanaan, dan transparansi kerja lembaga. Selain itu, dalam aspek kelembagaan lain, yaitu pengawasan dan penegakan hukum, sesuai dengan amanat UU No. 26 Tahun 2007 akan segera dibentuk pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

Dalam rangka meningkatkan pemahaman seluruh pemangku kepentingan, maka telah dilakukan sosialisasi dan advokasi terhadap peraturan perundang-undangan yang telah disusun serta beberapa NSPK ke berbagai pemangku kepentingan baik di tingkat pusat maupun daerah. Pelaksanaan sosialisasi dan advokasi diperlukan agar diperoleh kesamaan pemahaman terhadap produk penataan ruang yang berkualitas secara rutin dan intensif mengingat adanya dinamika pergantian pemangku kepentingan di daerah.

Aspek pengendalian pemanfaatan ruang untuk menjamin kesesuaian rencana dengan pelaksanaan, penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan dan peningkatan keseimbangan pembangunan antarfungsi/kegiatan saat ini masih lemah. Berdasarkan data yang ada, pada tahun 2007 sekitar 31 persen penggunaan lahan tidak sesuai dengan RTRWP dan yang terbesar berada di Pulau Jawa-Bali (48,35 persen).

TABEL 9.1
TINGKAT KESESUAIAN PENGGUNAAN LAHAN TERHADAP RTRWP

Pulau	Tingkat Kesesuaian (Hektar)			
	Sesuai	%	Tidak Sesuai	%
Sumatera	29.201.031	61,81	17.876.270	38,19
Jawa dan Bali	6.837.426	51,65	6.400.871	48,35
Kalimantan	36.644.902	68,68	16.710.461	31,32
Sulawesi	13.566.957	70,07	5.793.818	29,93
Nusa Tenggara dan Maluku	8.317.046	52,74	6.753.194	47,26
Papua	36.093.311	86,77	5.386.689	13,23
Total	130.660.673	68,31	58.921.301	30,80

Sumber : BPN, 2007

Pengendalian pemanfaatan ruang dilaksanakan dengan penyusunan *zoning regulation*, mekanisme perizinan, insentif dan disinsentif, serta penerapan sanksi bagi pelanggaran RTRW. Dalam rangka pengendalian tersebut, telah diadakan program peningkatan manajemen pengendalian pemanfaatan ruang di 32 provinsi sejak tahun 2006 terutama dalam aspek pemantauan evaluasi penataan ruang daerah.

9.1.3 Pertanian

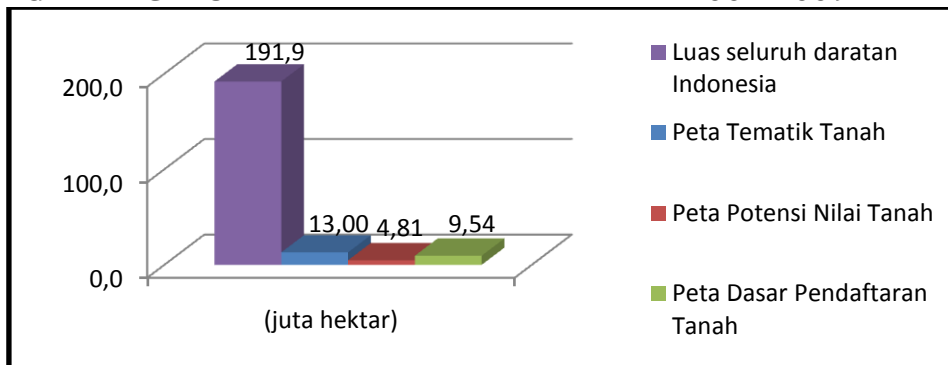
Tanah merupakan sumber daya yang penting dan strategis karena menyangkut hajat hidup seluruh masyarakat Indonesia yang sangat mendasar. Pengelolaan pertanian yang adil dan memperhatikan kearifan lokal diperlukan untuk mendukung keseluruhan elemen pelaksanaan pembangunan wilayah yang berkelanjutan. Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Prinsip tersebut telah diakomodasikan dalam UU No. 5/1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), yang didalamnya negara menjamin hak-hak masyarakat atas tanahnya dan memberikan pengakuan atas hak-hak atas tanah yang ada, termasuk hak ulayat.

Ketetapan MPR No. IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam telah menetapkan prinsip-prinsip dan arah kebijakan pembaruan agraria serta pemanfaatan sumber daya alam secara berkeadilan dan berkelanjutan. Ketetapan tersebut memberikan mandat kepada Pemerintah Indonesia untuk melakukan baik penataan peraturan perundang-undangan maupun penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah, sebagaimana yang juga digariskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPN) 2005-2025.

Sampai dengan tahun 2009, telah disertifikasi 39.681.839 bidang atau sekitar 45,69 persen dari total 86.845.839 bidang tanah di Indonesia. Dari jumlah bidang tanah yang sudah disertifikasi tersebut, 3.846.814 bidang di antaranya disubsidi oleh pemerintah, antara lain melalui Prona dan sertifikasi untuk kalangan petani, nelayan, usaha kecil dan mikro (UKM), serta peserta transmigrasi.

Dalam rangka meningkatkan akurasi hasil pengukuran dalam sertifikasi tanah sudah terpasang Kerangka Dasar Kadastral Nasional (KDKN) sebanyak 29.241 titik yang tersebar di seluruh wilayah Republik Indonesia. Selanjutnya, telah dihasilkan Peta Tematik untuk tanah seluas 13.000.000 hektar, dan Peta Potensi Nilai Tanah seluas 4.813.434 hektar. Sementara itu, peta dasar untuk pendaftaran tanah hingga kini mencakup 9.538.025 hektar tanah atau sekitar 4,97 persen dari total daratan Indonesia seluas 191,9 juta hektar. Dengan demikian, penyelesaian peta dasar perlu dilanjutkan dan dipercepat, agar dapat turut mengurangi dan mencegah ketidakpastian lokasi tanah serta sengketa tanah.

GAMBAR 9.1
GRAFIK CAKUPAN PEMETAAN PERTANAHAN 2004-2009



Sumber: BPN RI

Pada tahun 2007 terdapat 7.491 kasus pertanahan, 1.885 kasus di antaranya telah diselesaikan sampai dengan tahun 2008. Salah satu faktor yang turut memicu kasus pertanahan adalah ketimpangan penguasaan dan pemilikan tanah. Ketimpangan tersebut, antara lain, tercermin dari masih adanya konsentrasi pemilikan dan penguasaan tanah berskala besar, serta rata-rata penguasaan tanah petani yang relatif terbatas, yaitu kurang dari 0,5 hektar per rumah tangga petani. Dalam upaya mengurangi ketimpangan tersebut, pada kurun waktu 2004-2009 telah dilakukan redistribusi tanah sejumlah 422.535 bidang, inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan tanah (P4T) 1.165.451 bidang, konsolidasi tanah 22.335 bidang, konsolidasi tanah secara swadaya 84.786 bidang dan penyusunan neraca Penatagunaan Tanah (Neraca PGT) di 298 Kabupaten/Kota.

TABEL 9.2
PENCAPAIAN BEBERAPA KEGIATAN PERTANAHAN 2004-2009

No	Kegiatan	Jumlah (bidang tanah)
1	Sertifikasi tanah disubsidi pemerintah	3.846.814
2	Inventarisasi penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	1.165.451
3	Redistribusi tanah	422.535
4	Konsolidasi tanah secara swadaya	84.786
5	Konsolidasi tanah disubsidi pemerintah	22.335

Sumber: BPN RI

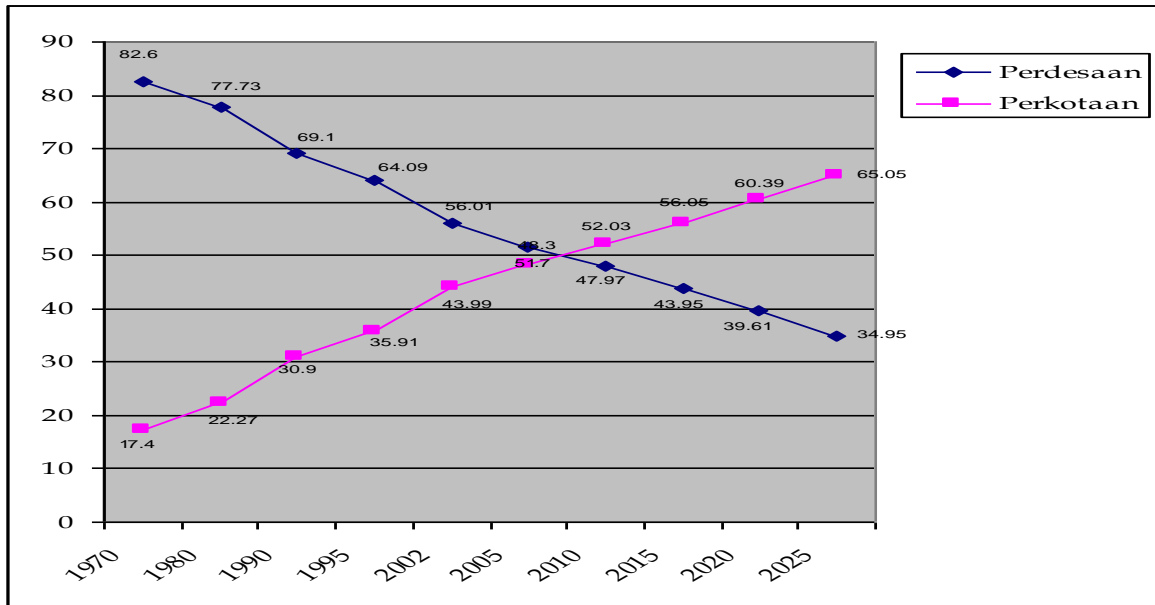
Dalam rangka memperbaiki kualitas layanan pertanahan telah diterbitkan Standar Prosedur Operasi Pengaturan dan Pelayanan (SPOPP), peningkatan kapasitas

sumberdaya manusia, serta kualitas sarana dan prasarana pelayanan. Di samping itu, guna memudahkan akses layanan pertanahan untuk masyarakat, sampai akhir tahun 2009, telah disediakan masing-masing 1 unit mobil dan 2 unit motor pada 274 kabupaten/kota dalam mendukung kegiatan Layanan Rakyat untuk Sertifikasi Tanah (Larasita), yang merupakan kantor pertanahan bergerak. Badan Pertanahan Nasional (BPN) memiliki 33 kantor wilayah BPN provinsi dan 419 kantor pertanahan kabupaten/kota, namun 57 di antara kantor pertanahan tersebut belum memiliki gedung sendiri, 342 belum memiliki gedung arsip dan 100 masih memerlukan rehabilitasi. Selanjutnya, di tengah tingginya tuntutan digitalisasi pelayanan pertanahan, 14 kantor wilayah dan 38 kantor pertanahan telah merintis pengembangan sistem informasi dan manajemen pertanahan nasional.

9.1.4 Perkotaan

Pola urbanisasi dan aktivitas perkotaan Indonesia menunjukkan bahwa pertumbuhan kota dan kawasan perkotaan masih sangat terpusat di pulau Jawa-Bali dan Sumatera, serta Sulawesi Selatan. Jumlah kota di Indonesia saat ini adalah 98 kota, dengan 34 kota di antaranya adalah daerah otonom baru yang terbentuk dalam kurun waktu tahun 1999—2009. Pada kurun waktu 1990—2000, laju pertumbuhan penduduk di kota inti metropolitan (Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, dan Semarang) berkisar antara 0,16 persen hingga 0,9 persen per tahun, tetapi laju pertumbuhan penduduk di wilayah sekitarnya mencapai 3 persen hingga 4,13 persen per tahun. Dengan terus bertambahnya jumlah kota dan jumlah penduduk kota tersebut, persentase jumlah penduduk perkotaan pada tahun 2025 diperkirakan akan menjadi 67,5 persen dari total penduduk Indonesia (Proyeksi Penduduk Indonesia 2005—2025, BPS 2008), seperti dapat dilihat pada Gambar 9.2.

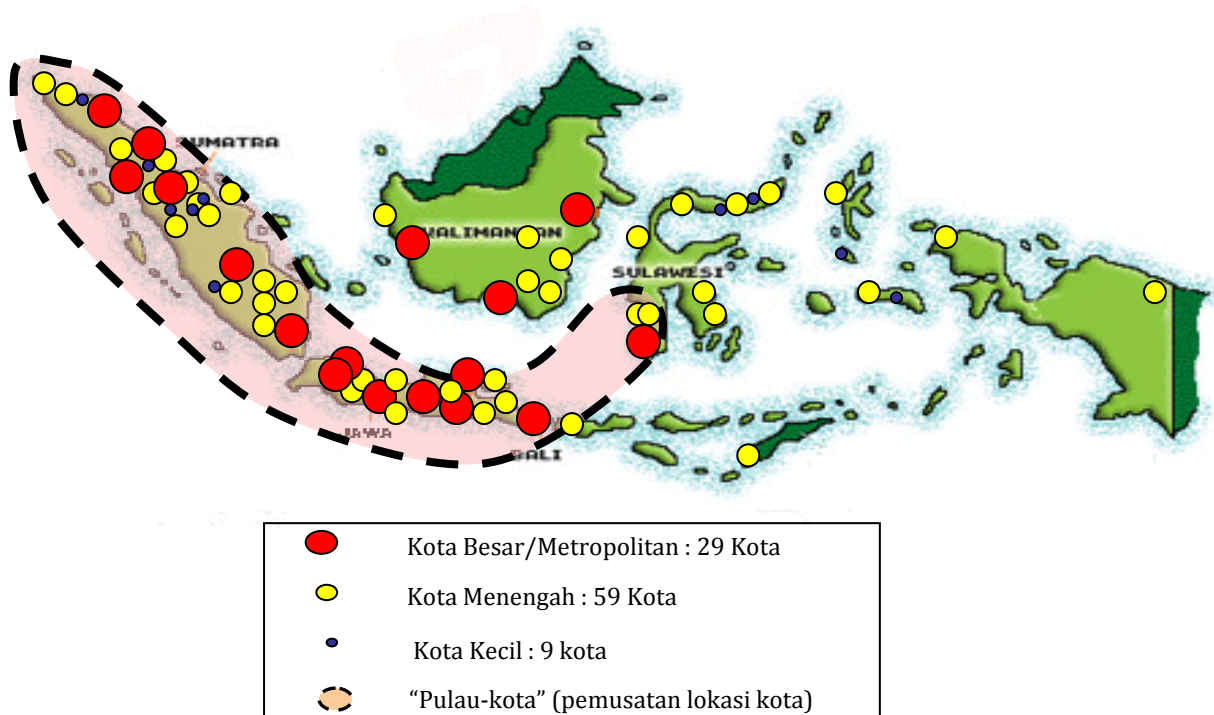
GAMBAR 9.2
PERSENTASE JUMLAH PENDUDUK PERKOTAAN DAN PERDESAAN DI INDONESIA



Sumber : Bappenas (2005), Pustra Kementerian PU (2008), diolah dengan asumsi growth 1.5 persen/thn

Dari 98 kota di Indonesia, persentase tipologi kota terbanyak adalah kota menengah (60,2 persen), diikuti oleh kota besar (16,3 persen), kota metropolitan (13,2 persen), kota kecil (9,2 persen), dan 1 kota yang jumlah penduduknya belum memenuhi kualifikasi sebagai kota kecil (1 persen).

GAMBAR 9.3
PERSEBARAN JENIS KOTA DI INDONESIA



Sumber : BPS 2007 (Data diolah)

Peranan perkotaan, khususnya kota-kota besar dan metropolitan, sangat signifikan sebagai penghela pertumbuhan ekonomi nasional atau dikatakan sebagai *engine of growth* perekonomian nasional. Kota-kota metropolitan mampu menyumbangkan 23,19 persen dari total PDRB Nasional tahun 2007, demikian pula kota-kota besar yang mampu menyumbangkan 8,83 persen. Sementara itu, kota-kota menengah yang merupakan jenis kota terbanyak di Indonesia hanya mampu menyumbangkan 7,63 persen. Peran kota-kota besar sebagai *engine of growth* tidak dapat lepas dari keberadaan sektor-sektor perdagangan besar (formal) dan sektor-sektor informal yang ada di kota-kota besar dan metropolitan

TABEL 9.3
KONTRIBUSI PDRB KOTA BESAR/METROPOLITAN
TERHADAP PDRB NASIONAL TAHUN 2007

Kota	Kontribusi PDRB terhadap PDRB Nasional (%)
Metropolitan	23,19
Kota Besar	8,83
Kota Menengah	7,63
Kota Kecil	0,13

Sumber : BPS, 2007 (Data diolah)

Kota menengah yang merupakan kelompok kota terbanyak di Indonesia bersama dengan kota-kota kecil memiliki keterbatasan sumber pendanaan pemerintah daerah dalam pembangunan kota sehingga belum berkembang secara optimal baik dari segi fisik, ekonomi, maupun sosial dan belum dapat menjadi pusat pemasaran bagi produksi kawasan perdesaan. Hal ini pulalah yang semakin memperluas kesenjangan kesejahteraan antara wilayah perkotaan dan perdesaan.

Di lain pihak, tingginya perpindahan penduduk dari desa ke kota menyebabkan pemadatan penduduk dan kegiatan di kota serta meluasnya kawasan pinggiran kota (*urban sprawl*). Kedua hal tersebut kemudian menyebabkan terjadinya pembentukan kota-kota baru. Hingga tahun 2009 terdapat penambahan 34 kota baru dan 165 kabupaten baru. Perkembangan perkotaan yang ekstensif juga menyebabkan besarnya persentase perubahan lahan sawah menjadi nonsawah dan perumahan dari tahun 2005 hingga tahun 2007. Di Pulau Jawa, sebesar 58,7 persen lahan sawah berubah menjadi perumahan dan 21,8 persen berubah menjadi lahan nonsawah, sedangkan di luar Pulau Jawa, sebesar 16,1 persen lahan sawah berubah jadi perumahan dan 48,6 persen berubah menjadi lahan nonsawah (Kementerian PU, 2008).

Pembangunan perkotaan menjadi salah satu agenda pembangunan jangka panjang 2005—2009 melalui penguatan sistem perkotaan nasional yang sudah tertuang dalam RTRWN; pembangunan ekonomi kawasan perkotaan dengan memberi kekuatan pada keterkaitan aliran produksi-pasar, sektor informal dan tradisional sebagai ciri khas nasional; serta penguatan kawasan perkotaan yang selalu berorientasi pada keserasian dan perlindungan lingkungan serta antisipasi pada mitigasi kebencanaan. Dalam UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, telah diatur penataan ruang kawasan perkotaan yang terdiri atas perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, pengendalian pemanfaatan ruang, dan kerja sama penataan ruang di kawasan perkotaan. Sementara itu, pada PP No. 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, telah diatur rencana struktur ruang wilayah nasional yang meliputi

sistem perkotaan nasional yang terkait dengan kawasan perdesaan dalam wilayah pelayanannya dan sistem jaringan prasarana utama.

Kebijakan untuk menata kembali pembangunan perkotaan telah dimulai melalui beberapa peraturan seperti Permendagri No. 1 Tahun 2008 tentang Pedoman Perencanaan Kawasan Perkotaan serta Peraturan Pemerintah (PP) No. 34 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Kawasan Perkotaan. Bahkan, upaya menata infrastruktur telah dilakukan, baik melalui penyusunan Rancangan Permendagri tentang Standar Pelayanan Perkotaan (SPP), maupun yang secara teknis telah diatur, antara lain Permendagri No. 9 tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) Perumahan dan Permukiman di Daerah, Perpres No. 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jabodetabekpunjur, Permen PU No. 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan, serta Permendagri No. 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan.

Dalam bidang pembangunan infrastruktur pelayanan publik di perkotaan, hasil-hasil yang dicapai dalam kurun waktu 2005—2009 di antaranya adalah bangunan *flyover* di kota metropolitan; mantapnya prasarana jalan sekitar 83,23 persen dari total jalan nasional, kecepatan rata-rata pada jalan nasional yang meningkat yang dicapai pada tahun 2007, bertambahnya lajur km pada jalan nasional; terbangunnya rumah baru layak huni, rumah susun sederhana sewa (rusunawa), rumah susun sederhana milik (rusunami) dengan peran swasta, perumahan melalui swadaya masyarakat dan peningkatan kualitas rumah, penyediaan sarana air minum yang melayani 11,07 juta jiwa, pengembangan sistem pengelolaan air limbah di 280 kab/kota, pengembangan pengelolaan persampahan di 360 kabupaten/kota, pengembangan sistem drainase, pencapaian rasio elektrifikasi sebesar 65,1 persen, penyediaan jasa akses internet di 105 lokasi, pembangunan pusat pendidikan dan pelatihan bidang TIK untuk meningkatkan e-literasi aparatur pemerintah, pekerja, dan masyarakat, serta penyelesaian proyek percontohan *e-government* di Batam dan *e-local government* bekerja sama dengan Pemkab Minahasa Selatan, Pemprov Kalimantan Timur, Pemkot Magelang, dan Pemkab Solok.

9.1.5 Perdesaan

Sejak dilaksanakannya kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah melalui UU 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, jumlah kabupaten, kota, kecamatan, kelurahan dan desa terus bertambah (lihat Tabel 9.4). Cakupan kawasan perdesaan hampir sekitar 82 persen wilayah Indonesia, yang di dalamnya sekitar 131,8 juta jiwa atau lebih dari 56,86 persen penduduk di Indonesia bertempat tinggal dan menggantungkan hidup di perdesaan (2009).

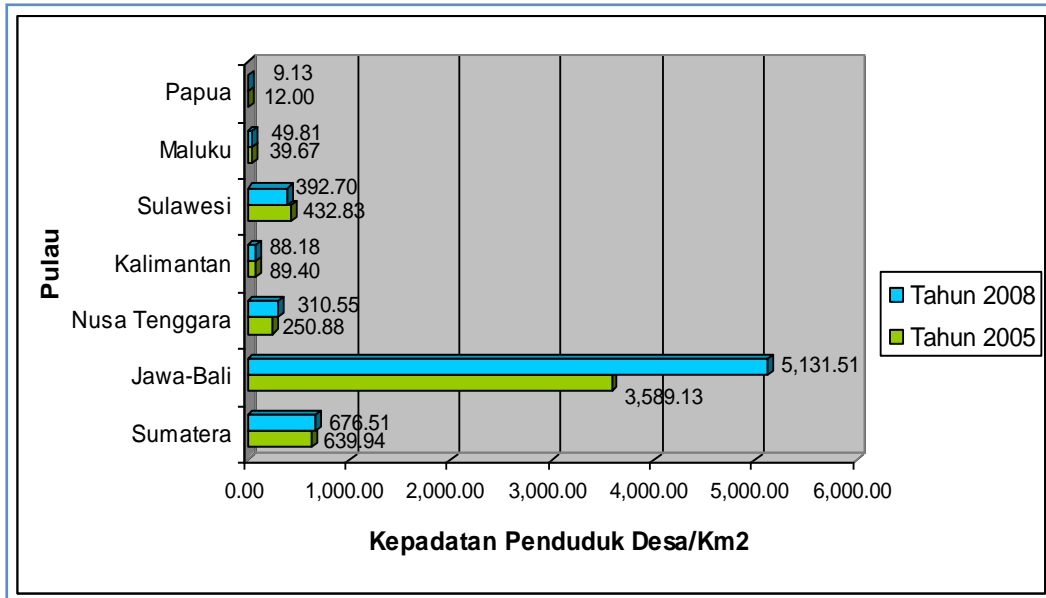
TABEL 9.4
PERKEMBANGAN JUMLAH DESA TAHUN 2005 DAN 2008

Pulau	Tahun 2005				Tahun 2008				
	Jumlah Desa	Kelurahan	Nagari	Lainnya	Jumlah	Jumlah Desa	Kelurahan	Lainnya	Jumlah
Sumatera	18.657	2.013	518	77	21.265	21.241	2.188	32	21.110
Jawa dan Bali	23.034	2.703	-	-	51.474	23.046	2.825	0	25.871
Kalimantan	5.421	506	-	257	6.184	6.055	526	49	6.630
Sulawesi	6.455	1.514	-	251	8.220	7.490	1.660	115	9.274
Maluku	1.514	121	-	19	1.654	1.781	142	19	1.942
Nusa Tenggara	3.172	381	-	5	3.558	3.269	435	12	3.716
Papua	3.156	127	-	56	3.339	4.329	119	36	4.484
Total	61.409	7365	518	665	69.957	67.211	7.895	272	75.378

Sumber: BPS, PODES 2005 dan 2008 (data diolah)

Dari aspek kependudukan, kawasan perdesaan menghadapi masalah persebaran penduduk yang tidak merata. Salah satu yang terkait dengan hal tersebut adalah terkonsentrasinya sebagian besar sumberdaya ekonomi di wilayah Jawa-Bali yang kemudian menyebabkan penduduk juga terkonsentrasi di wilayah ini. Wilayah Jawa-Bali yang luas wilayahnya kurang dari 7 persen dari keseluruhan wilayah Indonesia, dihuni oleh 59,82 persen penduduk. Tingkat kepadatan penduduk yang cukup tinggi di pulau Jawa tidak hanya terkonsentrasi di perkotaan, tetapi juga di perdesaan seperti yang terlihat dalam Gambar 9.4 dan Tabel 9.5.

**GAMBAR 9.4
KEPADATAN PENDUDUK DESA**



S
Sumber: Data PODES 2006 (data diolah)

**TABEL 9.5
JUMLAH PENDUDUK MENURUT DAERAH PERDESAAN
TAHUN 2005 DAN 2008**

Pulau	Jumlah Penduduk Menurut Daerah Perdesaan 2005 (jiwa)	%	Jumlah Penduduk Menurut Daerah Perdesaan 2008 (jiwa)	%
Sumatera	30.493.521	23,93	18.241.260	21,57
Jawa dan Bali	67.883.445	53,27	50.574.685	59,82
Kalimantan	7.721.435	6,06	3.574.227	4,23
Sulawesi	11.470.014	9,00	4.441.453	5,25
Maluku	1.676.136	1,32	5.392.117	6,38
Nusa Tenggara	6.418.017	5,04	1.055.941	1,25
Papua	1.772.243	1,39	1.269.122	1,50
Total	127.434.811	100	84.548.805	100

Sumber: BPS, PODES 2005 dan 2008 (data diolah)



Dilihat dari segi ketenagakerjaan, terdapat 60,1 persen atau sebesar 37,05 juta pekerja produktif yang ada di perdesaan bekerja di sektor pertanian (Sakernas-BPS, Agustus 2009), yang merupakan kekuatan ekonomi perdesaan yang sangat potensial. Menurut data Sakernas 2009, jumlah pengangguran terbuka pada bulan Agustus 2009 mencapai 8,96 juta jiwa atau 7,9 persen dari total angkatan kerja, dan 3,81 juta jiwa atau 5,8 persen di antaranya bermukim di perdesaan. Sementara itu, jumlah total setengah pengangguran mencapai 31,57 juta jiwa, yang 23,61 juta jiwa tinggal di perdesaan, sedangkan jumlah pekerja di kegiatan informal di perdesaan mencapai 46,87 juta (75,74 persen), jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan yang di perkotaan yang mencapai 17,97 juta (42,18 persen). Dengan terbatasnya kesempatan kerja di perdesaan, sementara kondisi masyarakatnya sebagian besar bekerja sebagai buruh dengan upah yang rendah, rata-rata pemilikan lahan yang sempit, produktivitas pertanian rendah, dan terbatasnya akses masyarakat perdesaan kepada pelayanan umum, kesemuanya memberikan kontribusi pada masih tingginya angka kemiskinan di perdesaan. Dari 32,53 juta (14,15 persen) orang miskin di Indonesia (Maret tahun 2009) lebih dari separuhnya tinggal di perdesaan (20,62 juta atau 17,35 persen).

Desa bukan sekedar unit administratif, atau hanya permukiman penduduk, melainkan juga merupakan basis sumberdaya ekonomi (tanah, sawah, sungai, ladang, kebun, hutan dan sebagainya), basis komunitas yang memiliki keragaman nilai-nilai lokal dan ikatan-ikatan sosial, ataupun basis pemerintahan yang mengatur dan mengurus sumberdaya dan komunitas tersebut. Di Indonesia, masyarakat hukum adat dilindungi dan diakui keberadaannya. Masyarakat hukum adat menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian dan sektor-sektor lain yang terkait dengan hak ulayat atau tanah adat, yang didalamnya terdapat sumber-sumber daya alam yang menjadi bagian sangat penting bagi kehidupan mereka. Pengakuan nasional dan internasional terhadap masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya, telah dinyatakan, baik melalui Pasal 18B ayat 2 dan Pasal 28 I ayat 3 UUD 1945, UU No. 32/2005, PP72/2004 maupun Sidang Umum Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) melalui pengesahan *The U.N. Declaration on the Rights of the Indigenous Peoples* pada tanggal 13 September 2007, dan kesepakatan ILO *Convention No. 169 tahun 1989 on The Rights of the Indigenous Peoples and Tribal Groups in Independent Countries* yang menjadi dasar bagi negara-negara di dunia untuk mengakui keberadaan hak masyarakat hukum adat.

Pembangunan desa yang berorientasi pada kebutuhan lokal dijalankan secara mandiri oleh desa dengan menggerakkan potensi modal sosial, kearifan lokal, dan sumberdaya lokal, misalnya pengaturan tata ruang, pola bercocok tanam, konservasi lingkungan, ataupun distribusi hasil alam kepada masyarakat, yang semakin berkembang dengan orientasi pada perbaikan infrastruktur desa sampai kepada perbaikan dan pemerataan pelayanan publik. Skema tersebut dilaksanakan melalui berbagai agenda pembangunan perdesaan, antara lain Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM) yang berbasis pada pengembangan desa mandiri, serta agenda afirmasi dan akselerasi desa-desa tertinggal yang berjumlah sekitar 40 persen

dari total desa di Indonesia.

Konsep desa mandiri telah tertuang dalam UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah yang dijabarkan lebih lanjut melalui PP No. 72/2005 tentang Desa yang memberikan ruang kepada desa untuk menjalankan pembangunan desa (desa membangun) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa). Rencana pembangunan desa ini didasarkan pada urusan-urusan yang menjadi kewenangan desa, potensi dan inisiatif lokal, semangat gotong royong dan partisipasi masyarakat, sekaligus disesuaikan dengan kearifan lokal setempat. Salah satu kombinasi antara UU No. 32/2004 dan UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang melahirkan Permendagri No. 51 Tahun 2007 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan Berbasis Masyarakat yaitu pembangunan kawasan perdesaan yang dilakukan atas prakarsa masyarakat meliputi penataan ruang secara partisipatif, pengembangan pusat pertumbuhan terpadu antar desa, serta penguatan kapasitas masyarakat, kelembagaan dan kemitraan, yang dilaksanakan melalui Pusat Pertumbuhan Terpadu Antardesa (PPTAD).

9.1.6 Ekonomi Lokal dan Daerah

Upaya pengembangan ekonomi daerah, selain bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam rangka peningkatan daya saing ekonomi daerah, tetapi juga untuk pemerataan pembangunan ekonomi, antarwilayah Jawa-luar Jawa, antarprovinsi, antarkabupaten/kota, juga antardesa-kota secara berkeadilan melalui peningkatan daya saing daerah.

TABEL 9.6
PERINGKAT INDONESIA DAN BEBERAPA NEGARA ASIA
DALAM *DOING BUSINESS SURVEY* TAHUN 2007—2010

Negara	Peringkat 2007	Peringkat 2008	Peringkat 2009	Peringkat 2010
Singapore	1	1	1	1
Thailand	18	15	12	12
Malaysia	25	24	21	23
China	93	83	86	89
Vietnam	104	91	91	93
India	134	120	132	133
Indonesia	135	123	129	122

Sumber: IFC-World Bank, Tahun 2007—2010

Daya saing daerah secara agregat dicerminkan dengan daya saing nasional

dibandingkan dengan negara lain, seperti yang digambarkan di dalam Tabel 9.6. Di sini terlihat daya saing Indonesia masih tertinggal dibandingkan dengan beberapa negara tetangga seperti Thailand, Malaysia, dan Vietnam. Laporan dari Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) dan *World Economic Forum* sebagaimana yang disajikan di Tabel 9.7 menunjukkan bahwa daya saing Indonesia dipengaruhi oleh kondisi infrastruktur yang belum memadai, iklim dunia usaha yang belum mendukung dan kualitas sumber daya manusia yang rendah, kelembagaan, wawasan pengembangan usaha dan kemitraan publik dan dunia usaha. Keterbatasan penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur masih menjadi persoalan pokok. Selain itu, ketersediaan energi di daerah yang masih terbatas, merupakan hal utama yang masih perlu diselesaikan untuk peningkatan daya saing daerah.

TABEL 9.7
ASPEK DAYA SAING DAERAH YANG TERENDAH
MENURUT WCR DAN KPPOD

Daya Saing Global (World Competitiveness Report 2008)	Tata Kelola Ekonomi Daerah (KPPOD 2008)
<ul style="list-style-type: none"> - Infrastruktur - Penerapan teknologi - SDM pendidikan tinggi dan keahlian - Kelembagaan 	<ul style="list-style-type: none"> - Iklim dunia usaha - Infrastruktur fisik daerah - Wawasan pengembangan usaha - Kemitraan publik dan dunia usaha

Untuk meningkatkan daya saing daerah dan nasional, pemerintah telah melakukan berbagai kebijakan, seperti upaya mendorong kerjasama antara pemerintah dengan swasta dalam penyediaan infrastruktur melalui Peraturan Presiden No 67 Tahun 2005, pengembangan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) yang terintegrasi antara Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dengan Kementerian / Lembaga yang memiliki kewenangan perizinan terkait dengan investasi.

Selain upaya pembangunan yang dilaksanakan secara sektoral, berbagai upaya pembangunan juga dilakukan secara terpadu dalam satu wilayah. Proses pembangunan daerah yang digerakkan oleh pengembangan ekonomi daerah umumnya diawali dengan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan baik yang bersifat lokal, dan berkembang ke skala regional maupun nasional dan internasional, melalui tahapan-tahapan yang dimulai dengan pusat pertumbuhan lokal, pengembangan kluster komoditas/industri sampai akhirnya terjadi proses aglomerasi di satu wilayah, yang selanjutnya memberikan efek pengganda bagi perkembangan daerah sekitarnya.

Sebagai bagian dari tahapan pengembangan tersebut, beberapa upaya

pengembangan pusat-pusat pertumbuhan wilayah lokal dalam kerangka pengembangan keterkaitan desa-kota telah dilakukan, baik dengan membangun pusat pertumbuhan lokal yang baru maupun dengan mengembangkan pusat pertumbuhan lokal yang telah ada, melalui pengembangan kawasan agropolitan dan minapolitan, kawasan sentra produksi, kawasan industri berbasis kompetensi inti industri daerah, dan juga dilakukan melalui pengembangan kawasan transmigrasi dengan skema Kota Terpadu Mandiri yang selanjutnya dibakukan dalam UU No. 29 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU No. 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian menjadi bagian dari kawasan transmigrasi.

Kawasan transmigrasi merupakan kawasan budidaya yang memiliki fungsi sebagai permukiman dan tempat usaha masyarakat dalam satu sistem pengembangan berupa wilayah pengembangan transmigrasi (WPT) atau lokasi permukiman transmigrasi (LPT). WPT merupakan pengembangan permukiman transmigrasi yang terdiri atas beberapa satuan kawasan pengembangan (SKP) yg salah satu di antaranya direncanakan untuk mewujudkan pusat pertumbuhan wilayah baru sebagai kawasan perkotaan baru, sedangkan LPT merupakan pengembangan permukiman transmigrasi untuk mendukung pusat pertumbuhan wilayah yang sudah ada atau yang sedang berkembang sebagai Kawasan Perkotaan Baru. Sampai dengan tahun 2008, rintisan pembangunan kawasan perkotaan baru melalui skema KTM telah dilaksanakan di 44 kawasan pada 22 provinsi, yaitu 14 kawasan di Pulau Sumatera (Provinsi NAD, Sumbar, Riau, Jambi, Bengkulu, Sumsel, dan Lampung), 10 kawasan di pulau Kalimantan (Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Selatan), 12 kawasan pulau Sulawesi (Provinsi Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tenggara), 1 kawasan di Provinsi Maluku Utara, 1 kawasan di Provinsi Maluku, 3 kawasan di Provinsi Papua, 1 kawasan di Provinsi NTT, dan 2 kawasan di Provinsi NTB.

Agropolitan dan Minapolitan merupakan pendekatan pembangunan kawasan berbasis agribisnis melalui pengembangan sektor/komoditas unggulan pertanian/perikanan, dengan tujuan untuk menjadikan kawasan tersebut sebagai pusat pertumbuhan ekonomi lokal berbasis agribisnis sehingga dapat menjadi lokomotif penggerak perekonomian lokal di kawasan tersebut dan daerah belakangnya. Perkembangan kawasan Agropolitan dan Minapolitan sampai dengan tahun 2008 telah mencapai 172 kawasan, yaitu sebanyak 146 kawasan merupakan kawasan agropolitan dan 26 kawasan merupakan kawasan minapolitan, yang tersebar di 33 provinsi di Indonesia. Dari total kawasan agropolitan, sebanyak 41 kawasan berada di Pulau Jawa dan sisanya tersebar di luar Pulau Jawa. Provinsi yang memiliki kawasan agropolitan terbanyak adalah Provinsi Jawa Tengah dengan jumlah sebanyak 11 kawasan.

Kawasan sentra produksi (KSP) pada dasarnya mengaitkan kegiatan produksi dan pemasaran, melalui pengembangan kelembagaan bisnis yang meliputi seluruh proses kegiatan agrobisnis, yaitu subsistem produksi dan pendukungnya, subsistem pengolahan, dan subsistem distribusi pemasaran sehingga dapat memberikan hasil yang



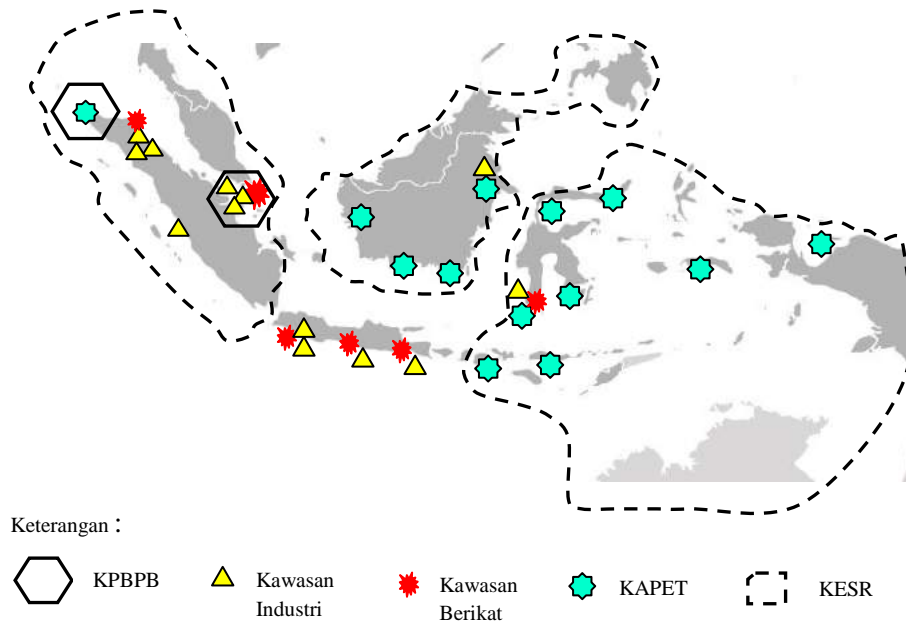
menguntungkan bagi semua pelaku pembangunan secara optimal. Pada tahun 2005, jumlah KSP yang telah dibangun adalah sebanyak 1.598 kawasan. Sebagian besar KSP berada di Pulau Jawa dan Bali, yaitu sebanyak 969 kawasan atau sebesar 61 persen, dengan provinsi-provinsi yang memiliki KSP terbanyak adalah Provinsi Jawa Timur dan Jawa Barat masing-masing sebanyak 433 kawasan dan 201 kawasan.

Kawasan industri berbasis kompetensi inti industri daerah menghasilkan sekumpulan keunggulan atau keunikan sumberdaya termasuk sumber daya alam dan kemampuan suatu daerah untuk membangun daya saing dengan upaya mengelompokkan industri inti yang saling berhubungan, baik dengan industri pendukung maupun dengan industri terkait sehingga dapat meningkatkan daya saing daerah. Pengembangan kompetensi inti industri daerah dikelompokkan ke dalam 8 (delapan) kelompok industri, yaitu: (1) makanan, minuman dan tembakau; (2) tekstil, barang kulit dan alas kaki; (3) barang kayu dan hasil hutan; (4) pupuk, kimia, dan barang dari karet; (5) semen dan bahan galian non logam; (6) logam dasar, besi, dan baja; (7) alat angkut, mesin, dan peralatan; dan (8) barang lainnya.

9.1.7 Kawasan Strategis

Kawasan strategis bidang ekonomi yang dibangun di berbagai wilayah potensial di Indonesia diharapkan dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi di wilayah sekitarnya, dan membentuk keterkaitan dengan daerah sekitarnya dalam suatu keterpaduan sistem ekonomi wilayah. UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan PP No. 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) telah menetapkan kawasan pengembangan ekonomi terpadu (KAPET) dan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas (KPBPB).

GAMBAR 9.5
SEBARAN LOKASI KAPET, KPBPB, KAWASAN BERIKAT,
KAWASAN INDUSTRI, DAN KERJASAMA EKONOMI SUB REGIONAL



Sumber: BAPPENAS, Tahun 2002

KAPET dikembangkan sebagai upaya meningkatkan kemampuan suatu wilayah mengembangkan daya saing produk unggulan sesuai dengan kompetensi sumber daya lokal dan diharapkan dapat berperan sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi bagi wilayah-wilayah yang kesenjangannya masih tinggi. Sementara itu, KPBPB dikembangkan sebagai upaya untuk memperluas dan memodernisasikan perekonomian melalui pengembangan industri manufaktur dan industri logistik sebagai respons terhadap pertumbuhan perdagangan dunia yang cepat dan peningkatan efisiensi pemanfaatan transportasi terutama kepelabuhanan baik laut maupun udara.

Lokasi KAPET telah ditetapkan di 12 kawasan di Kawasan Timur Indonesia dan 1 kawasan di Provinsi Aceh; sedangkan KPBPB di 4 kawasan dan keseluruhannya berada di Pulau Sumatera terutama pada kawasan yang dilalui jalur perdagangan internasional dan menjadi *buffer* negara maju sekitarnya yaitu KPBPB Sabang, Batam, Bintan, dan Karimun. Daftar 13 KAPET dan 4 KPBPB sebagaimana pada Tabel 9.8 dan Tabel 9.9.

TABEL 9.8
DAFTAR KAWASAN PENGEMBANGAN EKONOMI TERPADU (KAPET)

No	Provinsi	Nama Kapet
1	Aceh	Banda Aceh Darussalam (Kota Sabang dan Kabupaten Aceh Besar)
2	Nusa Tenggara Barat	Bima (Kabupaten Bima, Kota Bima, dan Kabupaten Dompu)
3	Nusa Tenggara Timur	Mbay (Kabupaten Ngada, Pulau Flores)
4	Kalimantan Barat	Khatulistiwa (Kota Singkawang, Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Sambas, Kabupaten Sanggau, Kabupaten Sintang, Kabupaten Landak, Kabupaten Kapuas Hulu)
5	Kalimantan Tengah	Daskakab (Daerah Aliran Sungai Kahayan Kapuan dan Barito - meliputi: Kota Palangkaraya, Kabupaten Barito Utara, Kabupaten Barito Selatan, Kabupaten Kapuas)
6	Kalimantan Selatan	Batulicin (Kabupaten Kotabaru)
7	Kalimantan Timur	Sasamba (Kota Samarinda, Kota Balikpapan, Kabupaten Kutai Kartanegara)
8	Sulawesi Utara	Menado Bitung (Kota Manado, Kota Bitung, Kota Tomohon, Kabupaten Minahasa, dan Kabupaten Minahasa Utara)
9	Sulawesi Tengah	Palapas *) (Kota Palu, Kabupaten Donggala, Kabupaten Parigi Moutong, Kabupaten Sigi)
10	Sulawesi Selatan	Pare Pare (Kabupaten Parepare, Kabupaten Barru, Kabupaten Sidrap, Kabupaten Pinrang, Kabupaten Enrekang)
11	Sulawesi Tenggara	Bank Sejahtera Sultra *) (Kota Kendari, Kabupaten Kolaka, Kabupaten <u>Konawe</u> , Kabupaten Pomalo)*
12	Maluku	Seram (Kabupaten Seram Bagian Barat, Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Maluku Tengah)
13	Papua	Teluk Cendrawasih *) (Kabupaten Biak Numfor, Kabupaten Yapen, Kabupaten Waropen, Kabupaten Supiori, Kabupaten Nabire).

Sumber: Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2008

Keterangan: *) Relokasi baru

TABEL 9.9
DAFTAR KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS (KPBPB)

No	Provinsi	KPBPB
1	Aceh	Kawasan Perdagangan Bebas Pelabuhan Bebas Sabang
2	Kepulauan Riau	Kawasan Perdagangan Bebas Pelabuhan Bebas Batam
		Kawasan Perdagangan Bebas Pelabuhan Bebas Bintan
		Kawasan Perdagangan Bebas Pelabuhan Bebas Karimun

Sumber: Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2008

Dalam rangka pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di Indonesia, juga dipacu dengan kebijakan pengembangan kawasan ekonomi khusus (KEK), yang merupakan suatu kawasan yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu yang ditujukan untuk melipatgandakan pertumbuhan ekonomi nasional, serta memberikan dampak yang besar pada peningkatan lapangan kerja dalam negeri. Perlunya pengembangan KEK dilatarbelakangi oleh belum berkembangnya kawasan khusus untuk proses industri berorientasi ekspor, dan di lain sisi diperlukan percepatan pertumbuhan ekonomi, modernisasi industri dan perdagangan serta pertumbuhan ekspor, yang akan memiliki dampak pada penciptaan lapangan kerja, peningkatan devisa, serta peningkatan produk jasa.

Pada tanggal 14 Oktober 2009 telah ditetapkan UU No 39 Tahun 2009 tentang KEK. Dengan diberlakukannya Undang-Undang tersebut, pengembangan KEK dilaksanakan dengan fungsi untuk melakukan dan mengembangkan usaha di bidang perdagangan, jasa, industri, pertambangan dan energi, transportasi, maritim dan perikanan, pos dan telekomunikasi, pariwisata, dan bidang lainnya. KEK dikembangkan melalui penyiapan kawasan yang memiliki keunggulan geoekonomi dan geostrategi serta berfungsi untuk menampung kegiatan industri, ekspor, impor, dan kegiatan ekonomi lain yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan daya saing internasional.

Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan melalui pengembangan kawasan strategis diarahkan untuk mencapai suatu pengelompokan kawasan fungsional yang memberikan *backward* dan *forward linkages* serta *multiplier effects* bagi daerah di sekitar kawasan tersebut secara regional, nasional, dan internasional untuk mengoptimalkan potensi pertumbuhan ekonomi daerah sehingga dapat meminimalisasi ketimpangan pembangunan antardaerah.

Pengembangan kawasan strategis tidak terlepas dari pengaturan hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dan pengelola kawasan antardaerah, yang hal ini diamanatkan dalam UU No 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam pembangunan dan pengembangan kawasan strategis sebagai pusat



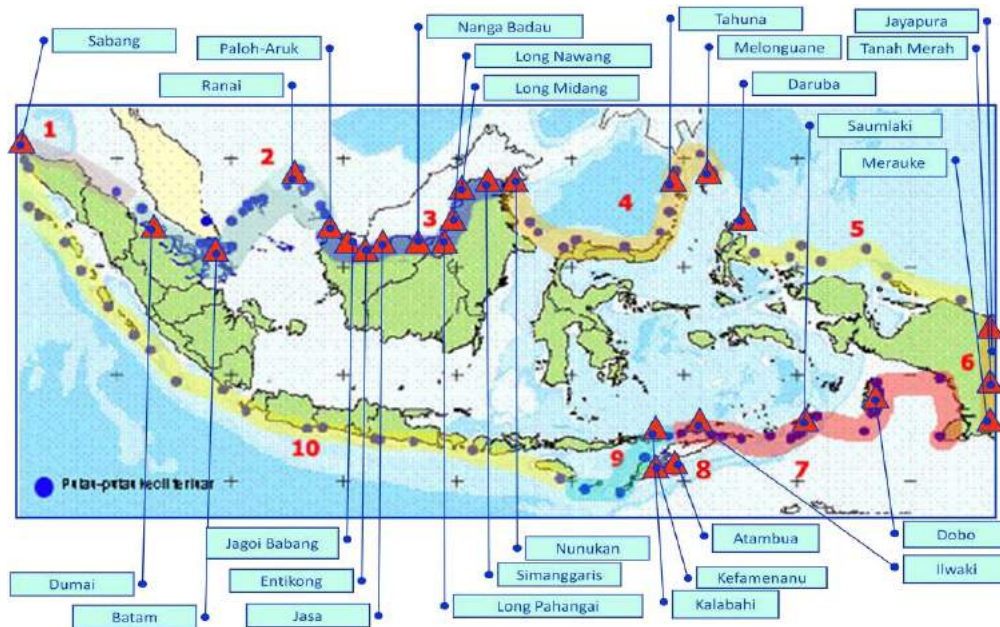
pertumbuhan, dibutuhkan sinergisme dan sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta badan pengelola kawasan dalam lingkup perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan. Dalam rangka optimalisasi pertumbuhan ekonomi dan menciptakan *multiplier effects* bagi daerah sekitar baik dalam skala regional, nasional, maupun internasional, dibutuhkan dukungan dan intervensi kegiatan pembangunan yang multisektor dalam mewujudkan pengembangan kawasan strategis dan dukungan terhadap pengembangan kawasan ekonomi khusus sebagai salah satu prioritas pembangunan nasional.

9.1.8 Kawasan Perbatasan

Kawasan perbatasan negara adalah wilayah kabupaten/kota yang secara geografis dan demografis berbatasan langsung dengan negara tetangga dan/atau laut lepas. Kawasan perbatasan terdiri dari kawasan perbatasan darat dan laut, yang tersebar secara luas dengan tipologi yang beragam, mulai dari pedalaman hingga pulau-pulau kecil terdepan (terluar). UU No 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang telah menetapkan kawasan perbatasan sebagai kawasan strategis dari sudut pandang pertahanan dan keamanan yang diprioritaskan penataan ruangnya. Berdasarkan UU No 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, kawasan perbatasan meliputi 10 kawasan perbatasan dengan negara tetangga, termasuk 92 (sembilan puluh dua) pulau kecil terdepan (terluar) yang memiliki nilai strategis sebagai lokasi penempatan titik dasar yang berperan penting dalam penentuan garis batas negara (Gambar 9.6).

Indonesia berbatasan dengan 10 (sepuluh) negara tetangga, yaitu India, Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, Filipina, Australia, Timor Leste, Palau, dan Papua Nugini. Secara keseluruhan kawasan perbatasan dengan negara tetangga tersebar di 12 (dua belas) provinsi. Kawasan perbatasan darat tersebar di 4 (empat) provinsi, yaitu Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Papua, dan Nusa Tenggara Timur. Garis batas negara di Pulau Kalimantan antara RI-Malaysia terbentang sepanjang 2004 Km, di Papua antara RI-PNG sepanjang 107 km, dan di Nusa Tenggara Timur antara RI-Timor Leste sepanjang kurang lebih 263,8 km. Sementara itu, kawasan perbatasan laut berada di 11 (sebelas) provinsi yang meliputi provinsi-provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Riau, Kepulauan Riau, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, Papua, dan Papua Barat.

GAMBAR 9.6
LOKASI 10 KAWASAN PERBATASAN DAN SEBARAN 26 KOTA
PUSAT KEGIATAN STRATEGIS NASIONAL DI PERBATASAN



Sumber: Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2008

Pada 12 provinsi di kawasan perbatasan, terdapat 38 kabupaten/kota di kawasan perbatasan yang diprioritaskan pengembangannya (Tabel 9.10), dan di dalamnya akan dikembangkan 26 Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) sebagai kota utama kawasan perbatasan yang perlu dipercepat pembangunannya selama 10 tahun ke depan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN). Pada periode 2010—2014, akan diupayakan percepatan pembangunan 20 PKSN sebagai pusat pelayanan kawasan perbatasan secara bertahap (Tabel 9.11)

Kawasan perbatasan memiliki posisi strategis sebagai pintu gerbang untuk berinteraksi langsung dengan negara tetangga serta memiliki nilai strategis terhadap kedaulatan negara, pertahanan, dan keamanan. Pengembangan kawasan perbatasan dilakukan dengan mengubah arah kebijakan pembangunan yang selama ini cenderung berorientasi ke dalam (*inward looking*) yang memandang kawasan perbatasan sebagai wilayah pertahanan, menjadi berorientasi ke luar (*outward looking*), yang didalamnya fungsi kawasan perbatasan di samping sebagai wilayah pertahanan juga untuk meningkatkan aktivitas perekonomian masyarakat dan sebagai pintu gerbang perdagangan dengan negara tetangga. Dengan demikian, pendekatan pembangunan

yang dilakukan, selain menggunakan pendekatan yang bersifat keamanan, juga diperlukan pendekatan kesejahteraan.

TABEL 9.10
PRIORITAS LOKASI PENANGANAN WILAYAH PERBATASAN DAN
PUSAT KEGIATAN STRATEGIS NASIONAL (PKSN) RPJMN 2010-2014

No	Provinsi	Kab/Kota		PKSN
1	Kalbar	1	Sambas	Paloh-Aruk
		2	Bengkayang	Jagoibabang
		3	Sanggau	Entikong
		4	Sintang	-
		5	Kapuas Hulu	Nanga Badau
2	Kaltim	6	Nunukan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Nunukan ▪ Simanggaris ▪ Long Midang
		7	Malinau	-
		8	Kutai Barat	-
3	Sulut	9	Kepulauan Talaud	Melonguane
		10	Kepulauan Sangihe	Tahuna
4	NTT	11	Kupang	-
		12	Timor Tengah Utara	Kefamenanu
		13	Belu	Atambua
		14	Alor	-
		15	Rote Ndao	-
5	Papua	16	Keerom	-
		17	Merauke	Merauke
		18	Boven Digoel	Tanah Merah
		19	Pegunungan Bintang	-
		20	Kota Jayapura	Jayapura
		21	Supiori	-
6	Kepulauan Riau	22	Kepulauan Anambas	-
		23	Karimun	-
		24	Kota Batam	Batam
		25	Natuna	Ranai
		26	Kota Bintan	-
7	Riau	27	Dumai	Dumai
		28	Bengkalis	-
		29	Rokan Hilir	-
		30	Indragiri Hilir	-
		31	Kepulauan Meranti	-
8	Papua Barat	32	Raja Ampat	-
9	Maluku	33	Maluku Barat Daya	-
		34	Maluku Tenggara Barat	Saumlaki
		35	Kepulauan Aru	-
10	Maluku Utara	36	Morotai	Daruba

No	Provinsi	Kab/Kota		PKSN
11	Sumatera Utara	37	Serdang Bedagai	-
12	NAD	38	Kota Sabang	Sabang

Sumber: BAPPENAS, 2009 dan Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2008

TABEL 9.11
TAHAPAN PENGEMBANGAN PKSN TAHUN 2010-2014*

2010	2011	2012	2013	2014
Paloh-Aruk	Melonguane	Kefamenanu	Atambua	Long Midang
Jagoibabang	Merauke	Simanggaris	Ranai	Daruba
Nangabadau	Sabang	Jayapura	Dumai	Tanah Merah
Entikong	Tahuna	Batam	Saumlaki	
Nunukan				

Sumber: Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2008 diolah BAPPENAS

*) Tahun dimulainya pengembangan PKSN secara bertahap terhadap 20 PKSN; sedangkan terhadap 6 PKSN lainnya sesuai dengan RTRWN akan dikembangkan pada periode berikutnya.

Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk mendorong pengembangan kawasan perbatasan dalam kurun waktu lima tahun terakhir, baik dari sisi regulasi maupun kegiatan pembangunan. Dari sisi regulasi, pada tahun 2005 pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden No 78 Tahun 2005 mengenai pengelolaan pulau-pulau kecil terdepan (terluar) yang mengamankan pengelolaan pulau-pulau kecil terluar dalam aspek keamanan, kesejahteraan, dan lingkungan. Pada tahun 2008 telah diterbitkan UU No 43 tentang Wilayah Negara, sebagai payung kebijakan bagi pengelolaan batas wilayah dan kawasan perbatasan negara secara terpadu, yang salah satunya mengamankan pembentukan badan pengelola perbatasan di tingkat nasional dan daerah.

Di samping aspek regulasi, berbagai upaya telah dilaksanakan oleh pemerintah dalam pengelolaan batas wilayah dan pengembangan kawasan perbatasan. Dari sisi penetapan dan penegasan batas, telah dilakukan Ratifikasi Perjanjian Batas Laut Kontinen (BLK) RI-Vietnam pada Mei 2007. Dengan Malaysia, telah dilakukan 14 kali perundingan untuk menyelesaikan permasalahan batas antarkedua negara. Dengan Filipina, telah dirundingkan penetapan batas ZEE dan Landas Kontinen di Laut Sulawesi. Terakhir, dengan Singapura, pada tanggal 10 Maret 2009 telah ditandatangani kesepakatan dengan Singapura tentang Penetapan Garis Batas Laut Wilayah Kedua Negara di Bagian Barat Selat Singapura. Dengan Palau, proses awal yang telah dilakukan untuk memulai perundingan batas laut telah berhasil disepakati. Dengan Timor Leste, masih dilakukan penyelesaian batas darat yang menjadi landasan untuk dapat melanjutkan pembahasan pada perundingan perbatasan laut, yang batas maritim

antarkedua negara baru akan dirundingkan setelah batas darat dituntaskan.

Dari sisi pertahanan dan keamanan, dalam beberapa tahun terakhir ini pemerintah telah melakukan pembangunan pos-pos pengamanan perbatasan dan pulau-pulau kecil terdepan (terluar). Namun demikian, dengan jarak antarpos perbatasan yang rata-rata masih berjarak 50 km dan pembangunan pos pulau terdepan (terluar) yang baru difokuskan di 12 pulau, tingkat kerawanan di wilayah perbatasan dan pulau terdepan (terluar) lainnya masih relatif tinggi. Gangguan keamanan yang masih terjadi di kawasan perbatasan terutama dalam bentuk aktivitas ilegal berupa pencurian sumber daya alam dan perpindahan patok-patok batas. Keterbatasan ekonomi masyarakat wilayah perbatasan dan pulau terdepan (terluar) juga seringkali dimanfaatkan oleh pihak asing untuk mengeruk sumber daya alam secara ilegal.

Sementara itu, dari sisi peningkatan kesejahteraan masyarakat, telah dilakukan berbagai upaya dalam penyediaan sarana prasarana wilayah, pengembangan perekonomian setempat, serta peningkatan kualitas sumberdaya manusia. Dalam aspek infrastruktur, misalnya telah dilakukan pembangunan jalan di kawasan perbatasan sepanjang 670,2 km, pembangunan jalan di pulau terdepan (terluar) sepanjang 571,8 km, pengoperasian kapal penyeberangan perintis, penyediaan listrik di kecamatan perbatasan, pengembangan bandar udara, pembangunan pemancar TVRI, prasarana perdagangan, dan berbagai jenis infrastruktur lainnya untuk menunjang kehidupan masyarakat di kawasan perbatasan. Meskipun demikian, secara umum hingga saat ini kondisi pembangunan di sebagian besar wilayah kabupaten/kota di kawasan perbatasan masih sangat jauh tertinggal bila dibandingkan dengan pembangunan wilayah lain ataupun dibandingkan dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat di wilayah negara tetangga yang berbatasan, khususnya di perbatasan Kalimantan. Jika ditinjau status ketertinggalan wilayah, 27 kabupaten di kawasan perbatasan masih dapat dikategorikan sebagai daerah tertinggal. Kondisi ini merupakan tantangan utama bagi upaya pengembangan kawasan perbatasan dalam kurun waktu lima tahun mendatang.

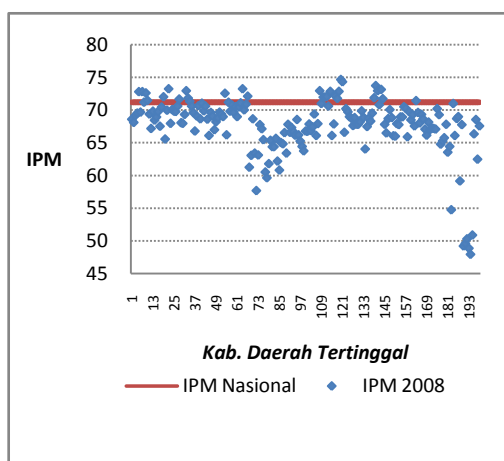
9.1.9 Daerah Tertinggal

Kesenjangan antar wilayah juga ditunjukkan oleh masih tingginya disparitas kualitas sumber daya manusia antarwilayah, perbedaan kemampuan perekonomian antardaerah, serta belum meratanya ketersediaan infrastruktur antarwilayah. Daerah-daerah dengan pencapaian pembangunan yang rendah dikategorikan sebagai daerah tertinggal, dan diperhitungkan memiliki indeks kemajuan pembangunan ekonomi dan sumberdaya manusia di bawah rata-rata indeks nasional. Persoalan daerah tertinggal dalam penanganannya bersifat lintas bidang, maka untuk mewujudkan pembangunan yang adil dan merata diperlukan percepatan pembangunan dengan didukung peran aktif dan kerjasama secara terpadu dari seluruh sektor terkait.

Kondisi rendahnya kualitas sumberdaya manusia dapat dicirikan oleh

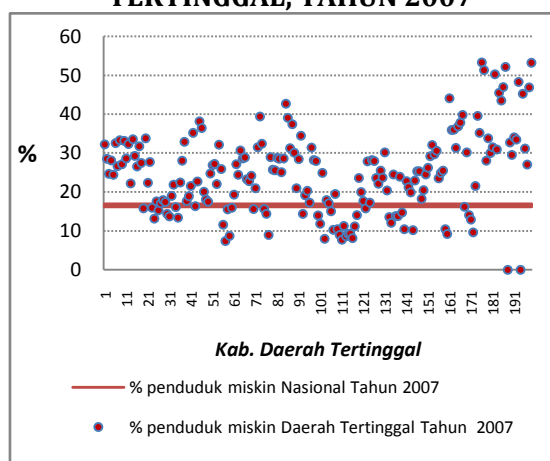
pencapaian indeks pembangunan manusia (IPM) daerah tertinggal pada tahun 2008 sebanyak 85 persen berada di bawah IPM nasional (71,2). Pada Gambar 9.7 terlihat penyebaran nilai IPM kabupaten tertinggal sebagian besar berada di bawah garis nilai IPM nasional. Di samping itu, daerah tertinggal masih menjadi konsentrasi adanya kemiskinan, yaitu dengan rata-rata tingkat kemiskinan sebesar 23,4 persen. Pada Gambar 9.8 terlihat penyebaran tingkat kemiskinan kabupaten daerah tertinggal sebagian besar (75 persen) berada di atas garis tingkat kemiskinan nasional (16,6 persen). Rendahnya kualitas sumberdaya manusia dan tingginya kemiskinan tersebut, di antaranya berkaitan dengan permasalahan rendahnya akses masyarakat terhadap pelayanan dasar khususnya pendidikan dan kesehatan, serta rendahnya akses terhadap sumber perekonomian yang dapat mendukung daya beli masyarakat.

GAMBAR 9.7
DISTRIBUSI IPM KABUPATEN
DAERAH TERTINGGAL, TAHUN 2008



Sumber: BPS

GAMBAR 9.8
DISTRIBUSI PERSENTASE PENDUDUK
MISKIN KABUPATEN DAERAH
TERTINGGAL, TAHUN 2007

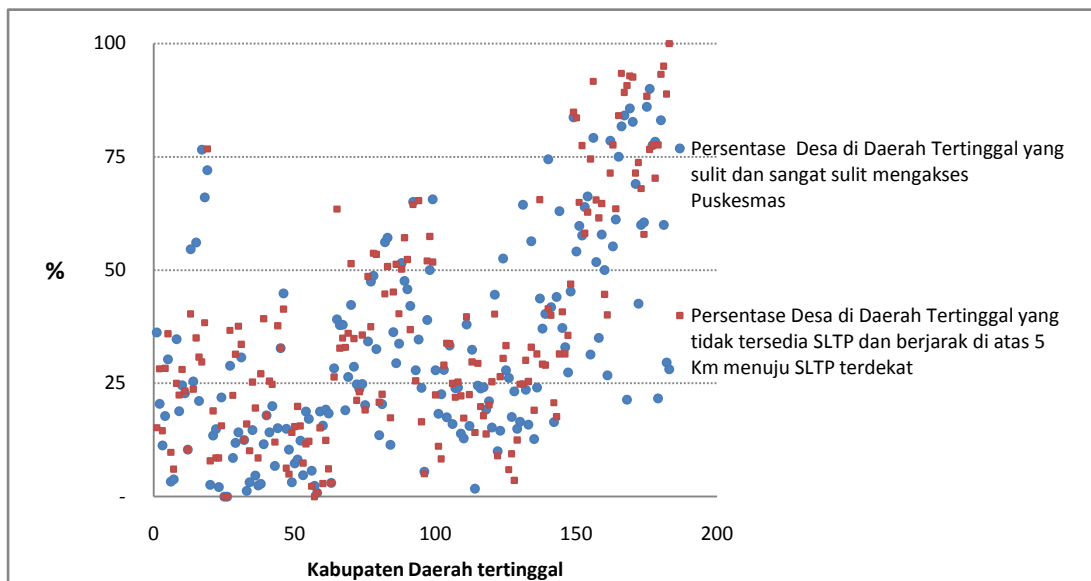


Sumber: BPS

Rendahnya akses masyarakat untuk memperoleh pelayanan kesehatan dapat ditunjukkan dari kabupaten daerah tertinggal yang memiliki lebih dari 25 persen dari total desanya sulit hingga sangat sulit mengakses puskesmas, masih mencapai 94 Kabupaten (51 persen) dari total daerah tertinggal. Sementara itu, untuk mewujudkan program wajib belajar 9 tahun di daerah tertinggal umumnya dihadapi persoalan dalam mengakses pelayanan sekolah lanjutan (SLTP). Rendahnya akses terhadap pelayanan sekolah lanjutan (SLTP) tersebut, dapat ditunjukkan dari kabupaten daerah tertinggal yang memiliki lebih dari 25 persen dari total desanya tidak memiliki SLTP dan berjarak di atas 5 Km menuju SLTP terdekat masih mencapai 110 Kabupaten (60 persen dari total daerah tertinggal). Bahkan, wilayah Papua umumnya memiliki persentase desa yang sulit mengakses pelayanan pendidikan (khususnya SLTP) dan pelayanan puskesmas sebagian besar di atas 50 persen dari total desa di setiap kabupaten (Gambar

9.9). Kondisi ini memberikan gambaran persoalan penyediaan infrastruktur pelayanan dasar yang masih belum merata, khususnya di kabupaten daerah tertinggal.

GAMBAR 9.9
DISTRIBUSI KABUPATEN DAERAH TERTINGGAL YANG SULIT MEMPEROLEH
AKSES PENDIDIKAN (SLTP) DAN KESEHATAN (PUSKESMAS)

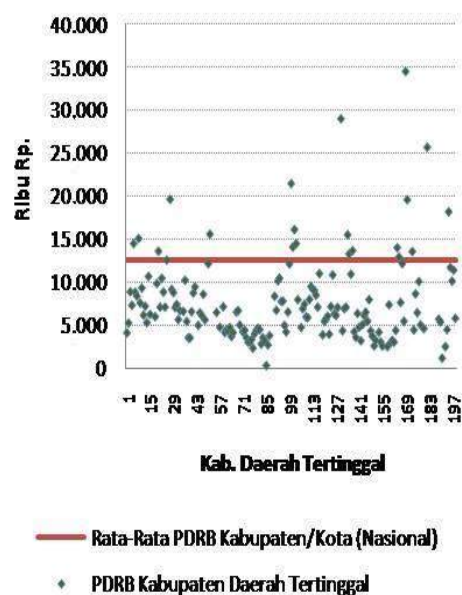


Sumber: PODES 2008

Berdasarkan ukuran PDRB perkapita nonmigas pada tahun 2007, daerah tertinggal baru mencapai rata-rata sebesar Rp 7,6 juta, sedangkan rata-rata PDRB perkapita seluruh kabupaten/kota di Indonesia telah mencapai 12,5 juta. Hal ini mengindikasikan pentingnya akselerasi laju pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal, agar mampu mengurangi kesenjangan dengan daerah yang telah maju. Permasalahan dari berbagai aspek tersebut, umumnya dihadapi daerah-daerah yang belum berkembang dan secara geografis terisolir dan terpencil, termasuk daerah perbatasan antarnegara, pulau-pulau kecil terluar (terdepan), daerah pedalaman, serta kawasan rawan bencana alam dan bencana sosial.

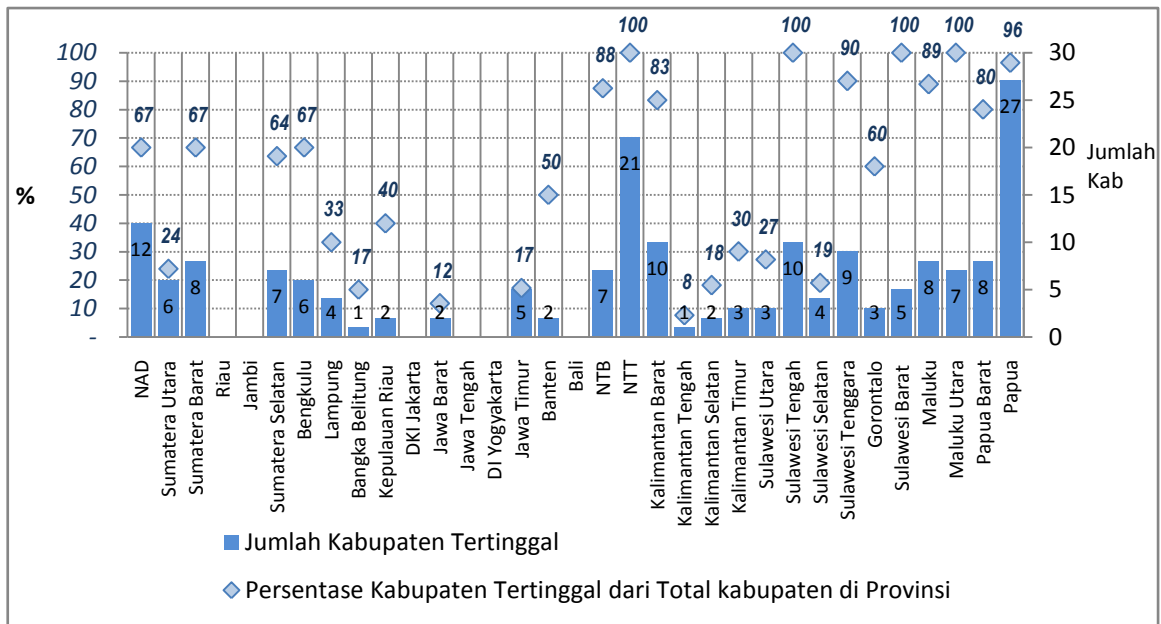
Kondisi kesenjangan pembangunan antarwilayah yang mengindikasikan adanya daerah tertinggal, telah menetapkan 199 kabupaten yang tergolong daerah tertinggal pada tahun 2004, yang sebanyak 62 persen berada di kawasan timur Indonesia. Melalui kebijakan, strategi, program, dan kegiatan yang dilaksanakan selama RPJMN 2004—2009, telah dihasilkan kemajuan dalam mengurangi daerah tertinggal. Hasil evaluasi daerah tertinggal menunjukkan bahwa sebanyak 40 kabupaten (20,1 persen) dari 199 kabupaten yang pada awal pelaksanaan RPJM Nasional dikategorikan sebagai daerah tertinggal berpotensi lepas dari status tertinggal menjadi daerah yang relatif maju dalam skala nasional. Selanjutnya, pada akhir tahun 2009 terdapat 10 kabupaten yang berpotensi untuk menjadi daerah maju berdasarkan arah kecenderungan yang terjadi. Dengan demikian, selama periode RPJMN 2004-2009 terdapat 50 kabupaten tertinggal yang telah keluar dari daftar daerah tertinggal berdasarkan ukuran ketertinggalan. Namun, sejalan dengan adanya pemekaran daerah, saat ini terdapat 34 kabupaten Daerah Otonom Baru hasil pemekaran dari daerah induk yang merupakan daerah tertinggal sehingga total daerah tertinggal pada tahun 2009 adalah sebanyak 183 kabupaten. Untuk itu, 183 kabupaten tertinggal ini akan menjadi fokus penanganan daerah tertinggal pada periode 2010-2014. Persentase kabupaten daerah tertinggal dari total kabupaten di setiap provinsi dapat dilihat pada Gambar 9.11.

Gambar 9.10
Distribusi PDRB Perkapita Daerah Tertinggal, Tahun 2007



Sumber: BPS

GAMBAR 9.11
JUMLAH PERSENTASE KABUPATEN DAERAH TERTINGGAL DARI TOTAL
KABUPATEN DI SETIAP PROVINSI, TAHUN 2009



Sumber: Hasil Perhitungan Bappenas dan Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal

Pada Gambar 9.11 terlihat bahwa provinsi yang seluruh kabupatennya termasuk daerah tertinggal adalah di Provinsi Nusa Tenggara Timur (21 kabupaten), Sulawesi Tengah (10 kabupaten), Sulawesi Barat (5 kabupaten), dan Maluku Utara (7 kabupaten). Provinsi yang memiliki jumlah kabupaten tertinggal terbanyak adalah di Provinsi Papua (sebanyak 27 kabupaten), dan Provinsi Nusa Tenggara Timur (sebanyak 21 kabupaten). Sementara itu, provinsi yang tidak memiliki kabupaten tertinggal adalah Provinsi Riau, Jambi, DKI Jakarta, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, dan Provinsi Bali. Daftar lokasi 183 kabupaten daerah tertinggal terdapat pada Tabel 9.12 berikut ini.

TABEL 9.12
DAFTAR 183 KABUPATEN TERTINGGAL

No	Provinsi	Nama kabupaten	No	Provinsi	Nama kabupaten
1	NAD	Simeulue	93	Kalimantan Barat	Kayong Utara
2	NAD	Aceh Singkil	94	Kalimantan Tengah	Seruyan
3	NAD	Aceh Selatan	95	Kalimantan Selatan	Barito Kuala
4	NAD	Aceh Timur	96	Kalimantan Selatan	Hulu Sungai Utara
5	NAD	Aceh Barat	97	Kalimantan Timur	Kutai Barat
6	NAD	Aceh Besar	98	Kalimantan Timur	Malinau
7	NAD	Aceh Barat Daya	99	Kalimantan Timur	Nunukan
8	NAD	Gayo Lues	100	Sulawesi Utara	Kepulauan Sangihe
9	NAD	Nagan Raya	101	Sulawesi Utara	Kepulauan Talaud
10	NAD	Aceh Jaya	102	Sulawesi Utara	Kepulauan Sitaro
11	NAD	Bener Meriah	103	Sulawesi Tengah	Banggai Kepulauan
12	NAD	Pidie Jaya	104	Sulawesi Tengah	Banggai
13	Sumatera Utara	Nias Barat	105	Sulawesi Tengah	Morowali
14	Sumatera Utara	Nias Utara	106	Sulawesi Tengah	Poso
15	Sumatera Utara	Nias	107	Sulawesi Tengah	Donggala
16	Sumatera Utara	Tapanuli Tengah	108	Sulawesi Tengah	Toli Toli
17	Sumatera Utara	Nias Selatan	109	Sulawesi Tengah	Buol
18	Sumatera Utara	Pakpak Barat	110	Sulawesi Tengah	Parigi Moutong
19	Sumatera Barat	Kepulauan Mentawai	111	Sulawesi Tengah	Tojo Una Una
20	Sumatera Barat	Pesisir Selatan	112	Sulawesi Tengah	Sigi
21	Sumatera Barat	Solok	113	Sulawesi Selatan	Selayar
22	Sumatera Barat	Sawahlunto/Sijunjung	114	Sulawesi Selatan	Jeneponto
23	Sumatera Barat	Padang Pariaman	115	Sulawesi Selatan	Pangkajene Kepulauan
24	Sumatera Barat	Solok Selatan	116	Sulawesi Selatan	Toraja Utara
25	Sumatera Barat	Dharmas Raya	117	Sulawesi Tenggara	Buton
26	Sumatera Barat	Pasaman Barat	118	Sulawesi Tenggara	Muna
27	Sumatera Selatan	Ogan Komering Ilir	119	Sulawesi Tenggara	Konawe
28	Sumatera Selatan	Lahat	120	Sulawesi Tenggara	Konawe Selatan
29	Sumatera Selatan	Musi Rawas	121	Sulawesi Tenggara	Bombana
30	Sumatera Selatan	Banyu Asin	122	Sulawesi Tenggara	Wakatobi
31	Sumatera Selatan	Oku Selatan	123	Sulawesi Tenggara	Kolaka Utara
32	Sumatera Selatan	Ogan Ilir	124	Sulawesi Tenggara	Konawe Utara
33	Sumatera Selatan	Empat Lawang	125	Sulawesi Tenggara	Buton Utara
34	Bengkulu	Kaur	126	Gorontalo	Gorontalo Utara
35	Bengkulu	Seluma	127	Gorontalo	Boalemo
36	Bengkulu	Mukomuko	128	Gorontalo	Pohuwato
37	Bengkulu	Lebong	129	Sulawesi Barat	Majene



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

No	Provinsi	Nama kabupaten	No	Provinsi	Nama kabupaten
38	Bengkulu	Kepahiang	130	Sulawesi Barat	Polewali Mandar
39	Bengkulu	Bengkulu Tengah	131	Sulawesi Barat	Mamasa
40	Lampung	Pesawaran	132	Sulawesi Barat	Mamuju
41	Lampung	Lampung Barat	133	Sulawesi Barat	Mamuju Utara
42	Lampung	Lampung Utara	134	Maluku	Maluku Tenggara Barat
43	Lampung	Way Kanan	135	Maluku	Maluku Tengah
44	Bangka Belitung	Bangka Selatan	136	Maluku	Buru
45	Kepulauan Riau	Natuna	137	Maluku	Kepulauan Aru
46	Kepulauan Riau	Anambas	138	Maluku	Seram Bagian Barat
47	Jawa Barat	Sukabumi	139	Maluku	Seram Bagian Timur
48	Jawa Barat	Garut	140	Maluku	Maluku Barat Daya
49	Jawa Timur	Bondowoso	141	Maluku	Buru Selatan
50	Jawa Timur	Situbondo	142	Maluku Utara	Halmahera Barat
51	Jawa Timur	Bangkalan	143	Maluku Utara	Halmahera Tengah
52	Jawa Timur	Sampang	144	Maluku Utara	Kepulauan Sula
53	Jawa Timur	Pamekasan	145	Maluku Utara	Halmahera Selatan
54	Banten	Pandeglang	146	Maluku Utara	Halmahera Utara
55	Banten	Lebak	147	Maluku Utara	Halmahera Timur
56	NTB	Lombok Barat	148	Maluku Utara	Morotai
57	NTB	Lombok Tengah	149	Papua Barat	Kaimana
58	NTB	Lombok Timur	150	Papua Barat	Teluk Wondama
59	NTB	Dompu	151	Papua Barat	Teluk Bintuni
60	NTB	Bima	152	Papua Barat	Sorong Selatan
61	NTB	Sumbawa Barat	153	Papua Barat	Sorong
62	NTB	Lombok Utara	154	Papua Barat	Raja Ampat
63	NTB	Sumbawa	155	Papua Barat	Tambrau
64	NTT	Nagekeo	156	Papua Barat	Maybrat
65	NTT	Sumba Tengah	157	Papua	Merauke
66	NTT	Sumba Barat Daya	158	Papua	Jayawijaya
67	NTT	Manggarai Timur	159	Papua	Nabire
68	NTT	Sabu Raijua	161	Papua	Biak Numfor
69	NTT	Sumba Barat	162	Papua	Paniai
70	NTT	Sumba Timur	163	Papua	Puncak Jaya
71	NTT	Kupang	164	Papua	Mimika
72	NTT	Timor Tengah Selatan	165	Papua	Boven Digoel
73	NTT	Timor Tengah Utara	166	Papua	Mappi
74	NTT	Belu	167	Papua	Asmat
75	NTT	Alor	168	Papua	Yahukimo
76	NTT	Lembata	169	Papua	Pegunungan Bintang
77	NTT	Flores Timur	170	Papua	Tolikara
78	NTT	Sikka	171	Papua	Sarmi
79	NTT	Ende	172	Papua	Keerom
80	NTT	Ngada	173	Papua	Waropen
81	NTT	Manggarai	174	Papua	Supiori
82	NTT	Rote Ndao	175	Papua	Mamberamo Raya
83	NTT	Manggarai Barat	176	Papua	Lanny Jaya

No	Provinsi	Nama kabupaten	No	Provinsi	Nama kabupaten
84	Kalimantan Barat	Sambas	177	Papua	Mamberamo Tengah
85	Kalimantan Barat	Bengkayang	178	Papua	Nduga
86	Kalimantan Barat	Landak	179	Papua	Yalimo
87	Kalimantan Barat	Sanggau	180	Papua	Puncak
88	Kalimantan Barat	Ketapang	181	Papua	Dogiyai
89	Kalimantan Barat	Sintang	182	Papua	Deiyai
90	Kalimantan Barat	Kapuas Hulu	183	Papua	Intan Jaya
91	Kalimantan Barat	Sekadau			
92	Kalimantan Barat	Melawi			

Sumber: Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal, 2009

9.1.10 Kawasan Rawan Bencana

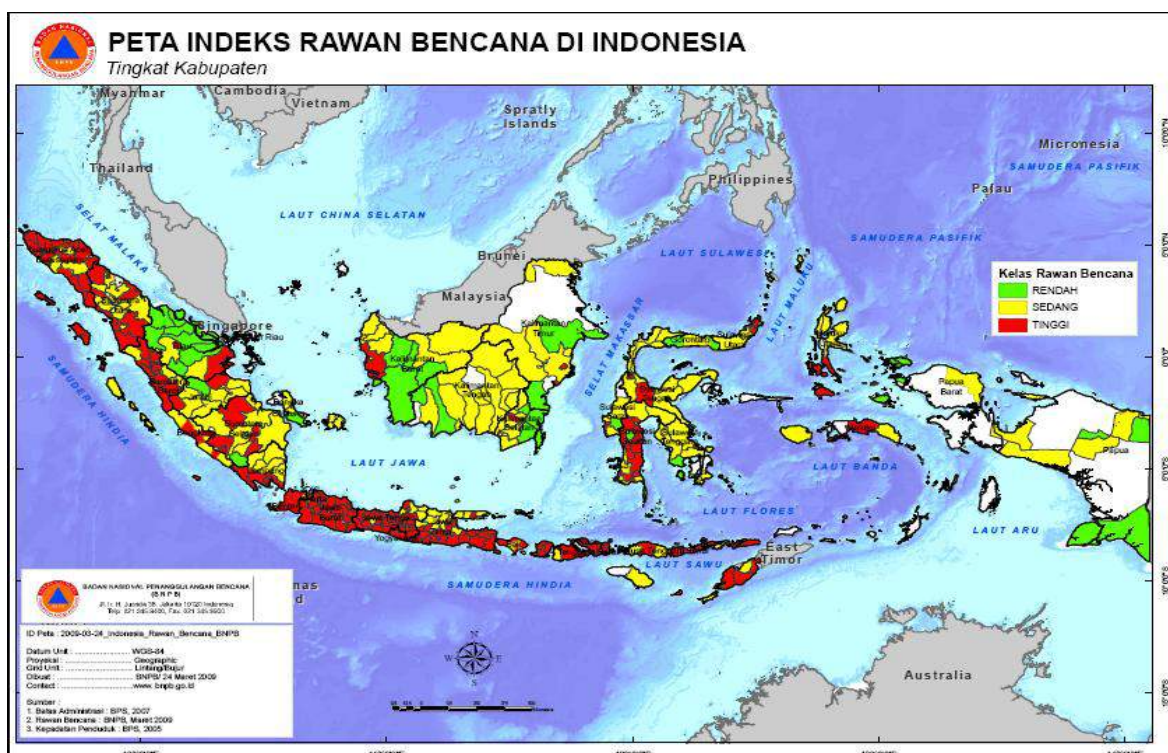
Berkaitan dengan kondisi Indonesia sebagai kawasan rawan bencana, dengan memperhatikan posisi geografis Indonesia yang berada pada pertemuan lempeng bumi serta lintasan gunung api aktif (*ring of fire*), Indonesia memiliki potensi ancaman bencana alam yang setiap saat dapat mengancam dan mempengaruhi kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat Indonesia. Kedepan, guna meminimalkan risiko terhadap ancaman kejadian bencana, perlu disikapi dengan meningkatkan kapasitas dalam penanganan dan pengurangan risiko bencana baik di tingkat pemerintah maupun masyarakat. Sebagaimana halnya untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, perlu dipadukan dengan upaya-upaya penanganan dan pengurangan risiko bencana secara komprehensif dan sistematis serta komitmen yang kuat dari semua pihak, mulai dari tingkat pemerintah pusat dan pemerintah daerah, hingga tingkat masyarakat.

Pengalaman dalam menangani berbagai wilayah yang terkena bencana, seperti di Aceh dan Nias; DI Yogyakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Barat; Kabupaten Alor (NTT); Kabupaten Nabire (Papua); Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Bengkulu; serta beberapa daerah bencana lainnya, termasuk penanganan semburan lumpur panas di Sidoarjo yang sampai saat ini masih terus berlangsung telah mengalami perkembangan seiring dengan upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah. Berbagai upaya telah dilakukan dalam rangka pemulihan wilayah pascabencana termasuk pemulihan ekonomi dan masyarakat untuk dapat kembali menjalankan kegiatan dan kehidupan seperti pada saat sebelum terjadinya bencana. Selain pelaksanaan rehabilitasi dan

rekonstruksi yang telah maupun masih berjalan di beberapa wilayah pascabencana pada kurun waktu lima tahun terakhir, pada tahun 2009 kejadian bencana kembali terjadi di Indonesia, yaitu gempa bumi di wilayah Provinsi Jawa Barat dan gempa bumi di wilayah Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Jambi. Dengan kejadian tersebut upaya rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah pascabencana kembali menjadi salah satu agenda pembangunan dalam kurun waktu lima tahun mendatang, yang telah memperhatikan dimensi pengurangan risiko bencana, sehingga upaya pembangunan kembali wilayah pascabencana dapat mewujudkan kondisi yang lebih baik.

Seiring dengan perubahan paradigma penanganan bencana di Indonesia yang telah mengalami pergeseran, yaitu dari sebelumnya ditekankan pada aspek tanggap darurat, menjadi lebih ditekankan pada keseluruhan manajemen risiko bencana. Sehubungan dengan itu, pada tahun 2006 pemerintah telah menerbitkan Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana (RAN-PRB) 2006—2009, yang akan dilanjutkan dengan Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana (RAN-PRB) 2010—2012, serta mengintegrasikan pengurangan risiko bencana ke dalam kebijakan dan perencanaan pembangunan sebagaimana telah tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) sejak tahun 2007 hingga tahun 2010.

GAMBAR 9.12
POTENSI KEJADIAN BENCANA DI INDONESIA



Sumber: <http://geospasial.bnppb.go.id/> (Tahun 2008)

Lebih jauh lagi, sebagai kerangka hukum penanggulangan bencana dan pengurangan risiko bencana, telah diterbitkan UU No 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana berikut 3 (tiga) peraturan turunannya, yaitu: (1) Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana; (2) Peraturan Pemerintah No 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana; dan (3) Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non-Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana.

Berdasarkan UU No 24 Tahun 2007, telah dipertegas bahwa penanggulangan bencana merupakan salah satu bagian dari pembangunan nasional dalam serangkaian kegiatan baik sebelum, pada saat, maupun sesudah terjadinya bencana. Selain itu, juga dipertegas bahwa penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat, yang dilaksanakan selaras dengan kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan daerah.

Selain UU No 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, upaya mitigasi dan pengurangan risiko bencana juga telah diamanatkan dalam kebijakan penataan ruang sesuai dengan UU No 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, yang mengamanatkan bahwa secara geografis Negara Kesatuan Republik Indonesia berada pada kawasan rawan bencana sehingga diperlukan penataan ruang yang berbasis mitigasi bencana sebagai upaya meningkatkan keselamatan dan kenyamanan kehidupan dan penghidupan. Berikutnya adalah UU No 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, yang menguatkan bahwa dalam menyusun rencana pengelolaan dan pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil terpadu, pemerintah dan/atau pemerintah daerah wajib memasukkan dan melaksanakan bagian yang memuat mitigasi bencana di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sesuai dengan jenis, tingkat, dan wilayahnya.

Selanjutnya untuk mengatur kelembagaan penanggulangan bencana di tingkat pusat dan daerah, telah diterbitkan Peraturan Presiden No 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), serta Permendagri No 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), yang diperkuat dengan BNPB No 3 tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

Dalam rangka melaksanakan amanat UU No 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, dinyatakan bahwa penanggulangan bencana merupakan urusan bersama pemerintah, masyarakat, dunia usaha, organisasi nonpemerintah internasional, serta seluruh pemangku kepentingan lainnya, telah dibentuk Platform Nasional Pengurangan Risiko Bencana yang berfungsi untuk memberikan advokasi dan dukungan kepada pemerintah dalam upaya melaksanakan pengurangan risiko bencana (PRB) secara terencana, sistematis, dan menyeluruh. Melalui pembentukan Platform



Nasional Pengurangan Risiko Bencana tersebut, Indonesia telah mendapatkan penghargaan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa dan dunia internasional karena Indonesia telah memperlihatkan adanya komitmen global untuk upaya pengurangan risiko bencana, sebagai bagian dari implementasi Kerangka Aksi Hyogo (*Hyogo Framework for Action/HFA*) 2005-2015. Masih dalam kerangka pelaksanaan amanat undang-undang penanggulangan bencana, pemerintah saat ini tengah menyusun Rencana Nasional Penanggulangan Bencana dengan kerangka waktu yang sama dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2010-2014, sebagai landasan dalam penyelenggaraan pelaksanaan penanggulangan bencana dan pengurangan risiko bencana di Indonesia.

9.1.11 Desentralisasi, Hubungan Pusat Daerah, dan Antardaerah

Pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah yang mantap menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan percepatan dan pemerataan pembangunan di Indonesia. UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah menjadi landasan hukum utama pelaksanaan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia. Sampai saat ini telah diterbitkan seluruh peraturan pelaksanaan dari UU No. 33 Tahun 2004 dan 26 peraturan pelaksanaan (79 persen) dari UU No. 32 Tahun 2004.

Dengan telah diselesaikannya sebagian besar peraturan pelaksanaan dari UU No. 32 Tahun 2004 dan UU No. 33 Tahun 2004, proses desentralisasi di bidang administrasi pemerintahan dan keuangan (fiskal) telah berjalan dengan makin mantap karena format hubungan pusat-daerah yang baru, yang lebih mendorong kemandirian daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, hubungan kewenangan dan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta hubungan antarpemerintah daerah, telah terbangun. Berbagai kerangka regulasi, rambu-rambu, dan pedoman serta skema pendanaan yang dibutuhkan pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota dalam menjalankan otonomi daerahnya, telah pula tersedia. Dana Perimbangan, yang terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK), yang makin meningkat baik dalam angka nominal maupun proporsinya terhadap APBN secara umum telah membantu mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (ketimpangan vertikal) dan antarpemerintah daerah (ketimpangan horisontal), meningkatkan aksesibilitas publik terhadap prasarana dan sarana sosial ekonomi dasar di daerah, mengurangi kesenjangan pelayanan publik antardaerah, mendukung kegiatan-kegiatan prioritas nasional yang menjadi urusan daerah, serta meningkatkan daya saing daerah melalui pembangunan infrastruktur.

Gambaran umum mengenai kondisi saat ini terkait prioritas bidang tersebut di atas adalah sebagai berikut.

1. Penataan Pembagian Urusan Pemerintahan antar Tingkat Pemerintahan

Dengan telah diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, pemerintahan daerah provinsi, dan pemerintahan daerah kabupaten/kota, pembagian urusan pemerintahan antartingkat pemerintahan telah menjadi lebih jelas. Peraturan pemerintah ini telah membagi 31 bidang urusan pemerintahan kepada pemerintah pusat, pemerintahan daerah provinsi, dan pemerintahan daerah kabupaten/kota.

Selanjutnya, berdasarkan peraturan pemerintah ini, pemerintahan daerah diharapkan menyusun peraturan daerah tentang urusan yang telah menjadi kewenangannya. Kemudian, pemerintahan daerah juga diharapkan menyusun kelembagaan atau organisasi perangkat daerah yang sesuai, untuk melaksanakan berbagai urusan yang telah menjadi kewenangan daerah tersebut dengan mempertimbangkan potensi dan kemampuan tiap-tiap daerah.

2. Peningkatan Kerja Sama Pemerintah Daerah

Dalam era desentralisasi dan otonomi daerah, regulasi yang mengatur kerja sama antardaerah adalah Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 120/1730/SJ tanggal 13 Juli 2005. Selanjutnya, diterbitkan PP No. 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah, Permendagri No. 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Pihak Luar Negeri, Permendagri No. 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah dan Permendagri No. 23 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Kerja Sama Daerah. PP No. 50 Tahun 2007 ini juga menjadi dasar hukum bagi kerja sama antara pemerintah daerah dengan pihak ketiga.

Bentuk kerja sama yang telah ada saat ini cukup beragam, mulai dari kerja sama tanpa pembentukan organisasi baru sampai pada pembentukan organisasi baru dengan nama khusus yang menjadi ciri khas daerah masing-masing. Selain itu, terdapat kerja sama yang diinisiasi oleh pemerintah provinsi untuk semua wilayah kabupaten/kota di wilayahnya, dalam rangka koordinasi penyelenggaraan pembangunan. Bentuk kerja sama lainnya adalah kerja sama antara pemerintah daerah dengan pihak ketiga (kementerian/lembaga, perusahaan swasta berbadan hukum, BUMN, BUMD, koperasi, yayasan, dan lembaga di dalam negeri lainnya berbadan hukum). Beberapa bidang yang dapat dikerjasamakan di antaranya promosi investasi, sarana dan prasarana, kesehatan, pendidikan, perekonomian, serta sosial budaya.

3. Penataan Daerah Otonom Baru

Dalam PP No. 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah disebutkan bahwa pembentukan daerah (daerah otonom baru/DOB) pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik guna

mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Pembentukan DOB akan mempersingkat rentang kendali antara pemerintah dan masyarakat, khususnya pada wilayah-wilayah yang belum terjangkau oleh fasilitas pemerintahan. Pembentukan DOB juga diharapkan memperbaiki pemerataan pembangunan dan memungkinkan sumber daya mengalir ke daerah yang masih belum berkembang. Di samping itu, terbentuknya DOB akan lebih mengembangkan demokrasi lokal melalui pembagian kekuasaan pada tingkat yang lebih kecil.

Pada akhir tahun 2006, pemerintah telah mengeluarkan himbuan untuk melakukan penundaan (moratorium) atas pemekaran daerah. Himbuan tersebut disampaikan terkait dengan berbagai hasil evaluasi yang dilakukan terhadap DOB yang telah ada saat itu, yang menunjukkan bahwa sebagian besar dari DOB tersebut masih belum menunjukkan hasil pembangunan seperti yang diharapkan, dan bahkan ada yang menunjukkan kenyataan sebaliknya. Himbuan untuk menunda pemekaran daerah juga didasari oleh adanya beban keuangan negara yang semakin meningkat terutama untuk mendanai satuan kerja di daerah (instansi vertikal).

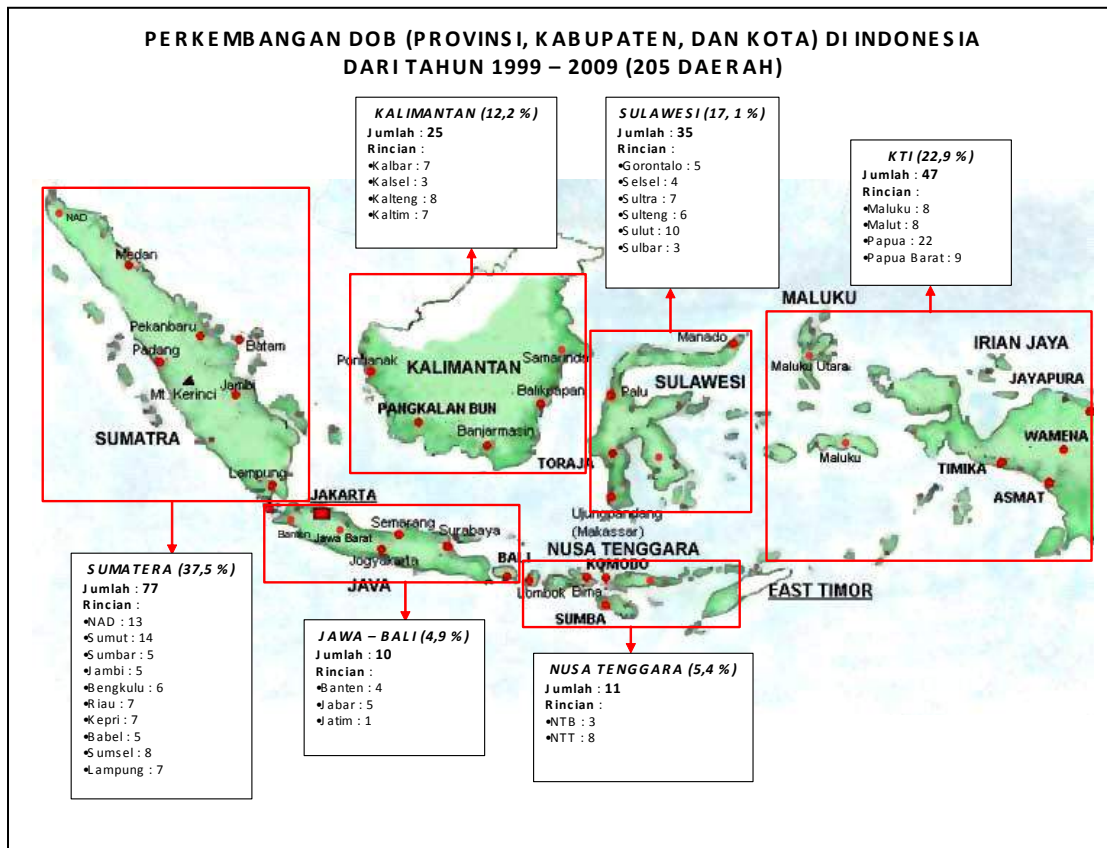
Pada periode 2005—2009, telah terbentuk 57 DOB dengan rincian 50 kabupaten dan 7 kota otonom baru sehingga sampai akhir tahun 2009 telah terbentuk sebanyak 205 DOB yang terdiri dari 7 provinsi, 164 kabupaten, dan 34 kota. Perkembangan DOB dapat dilihat pada Tabel 9.13 dan Gambar 9.13 di bawah ini. Dengan demikian, jumlah daerah saat ini adalah 33 provinsi dan 497 kabupaten/kota (398 kabupaten otonom dan 93 kota otonom, serta 5 kota administratif dan 1 kabupaten administratif di Provinsi DKI Jakarta).

TABEL 9.13
PERKEMBANGAN PEMBENTUKAN DAERAH OTONOM BARU
2005-2009

Tahun	Provinsi	Kabupaten	Kota	Jumlah	
				Kab/Kota	Total
2005	0	0	0	0	0
2006	0	0	0	0	0
2007	0	21	4	25	25
2008	0	27	3	30	30
2009	0	2	0	2	2
Total	0	50	7	57	57

Sumber: Kementerian Dalam Negeri, 2009

GAMBAR 9.13



Sumber: Kementerian Negara PPN/Bappenas, 2009 (diolah)

4. Pengawasan dan Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah

Dalam rangka membangun pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan kementerian/lembaga yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah, Pemerintah telah menetapkan PP No. 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan. Selanjutnya, dalam rangka pengawasan Pemerintah terhadap pemerintah daerah, telah diterbitkan PP No. 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat. Demikian pula, untuk mengevaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah, telah terbit PP No. 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan PP No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah.

Untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif di daerah, pemerintah pusat telah melakukan evaluasi terhadap perda-perda tentang pungutan daerah (pajak daerah dan retribusi daerah) dan selanjutnya membatalkan/merevisi perda-perda yang dinilai telah menimbulkan biaya ekonomi tinggi dan tidak kondusif bagi iklim investasi di daerah. Gambaran Peraturan Daerah yang direkomendasikan untuk dibatalkan atau direvisi dapat dilihat pada tabel-tabel di bawah ini.

TABEL 9.14
JUMLAH PERDA PUNGUTAN DAERAH YANG DIREKOMENDASIKAN
UNTUK DIBATALKAN/DIREVISI BERDASARKAN WILAYAH,
TAHUN 2001 - 2009

No	Wilayah	2001-2006	2007	2008	2009*	Jumlah
1	Nanggroe Aceh Darussalam	9	22	38	12	81
2	Sumatera Utara	97	70	79	1	247
3	Sumatera Barat	48	32	44	2	126
4	Riau	41	23	11	8	83
5	Kepulauan Riau	6	4	7	7	24
6	Jambi	37	15	33	12	97
7	Sumatera Selatan	20	19	21	25	85
8	Bangka Belitung	11	28	0	10	49
9	Bengkulu	21	4	19	32	76
10	Lampung	26	0	0	0	26
11	DKI Jakarta	1	0	0	0	1
12	Jawa Barat	58	62	54	0	174
13	Banten	23	17	21	0	61
14	Jawa Tengah	69	46	74	13	202
15	DI Yogyakarta	31	6	15	0	52
16	Jawa Timur	75	82	106	9	272
17	Kalimantan Barat	36	19	27	0	82
18	Kalimantan Tengah	46	49	43	0	138
19	Kalimantan Selatan	36	19	45	2	102
20	Kalimantan Timur	38	24	71	35	168
21	Sulawesi Utara	24	10	11	12	57
22	Gorontalo	21	12	20	17	70
23	Sulawesi Tengah	31	1	27	11	70
24	Sulawesi Selatan	80	30	32	1	143
25	Sulawesi Barat	7	10	6	0	23
26	Sulawesi Tenggara	15	15	48	0	78
27	Bali	27	14	14	9	64
28	Nusa Tenggara Barat	42	35	37	11	125
29	Nusa Tenggara Timur	26	19	10	9	64

No	Wilayah	2001-2006	2007	2008	2009*	Jumlah
30	Maluku	16	12	8	0	36
31	Maluku Utara	5	5	42	8	60
32	Papua	10	44	34	0	88
33	Papua Barat	6	25	36	0	67
	Total	1.039	773	1.033	246	3.091

Keterangan:

Sampai dengan pertengahan Juli 2009

Sumber: Nota Keuangan dan APBN 2010

TABEL 9.15
JUMLAH PERDA PUNGUTAN DAERAH YANG DIREKOMENDASIKAN
UNTUK DIBATALKAN/DIREVISI BERDASARKAN SEKTOR KEGIATAN,
TAHUN 2001 – 2009

No	Sektor	2001-2006	2007	2008	2009*	Jumlah
1	Administrasi dan Kependudukan	2	29	58	14	103
2	Energi dan Sumber Daya Mineral	64	104	114	20	302
3	Perindustrian dan Perdagangan	134	113	136	51	434
4	Kehutanan	106	103	81	21	311
5	Kelautan dan Perikanan	52	34	39	10	135
6	Kesehatan	23	20	46	10	99
7	Ketenagakerjaan	65	22	48	6	141
8	Pekerjaan Umum	42	41	51	27	161
9	Komunikasi dan Informatika	17	5	12	0	34
10	Koperasi dan UKM	59	1	16	0	76
11	Lingkungan Hidup	24	18	19	5	66
12	Budaya dan Pariwisata	47	77	159	26	309
13	Perhubungan	165	132	139	1	477
14	Pertanian	224	60	58	9	351
15	Sumbangan Pihak Ketiga	11	10	12	1	34
16	Lain-lain	4	4	45	5	58
	Total	1.039	773	1.033	246	3.091

Keterangan:

Sampai dengan pertengahan Juli 2009

Sumber: Nota Keuangan dan APBN 2010



Dalam rangka pengawasan penggunaan dana pembangunan juga dilakukan penilaian terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Penilaian tersebut berupa opini sebagai pernyataan profesional pemeriksa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengenai kewajaran informasi keuangan, yang disajikan dalam laporan keuangan dengan didasarkan pada kriteria: (i) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, (ii) kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), (iii) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan (iv) efektivitas sistem pengendalian intern. Berdasarkan hal tersebut, terdapat 4 (empat) jenis opini yang dapat diberikan oleh pemeriksa, yakni (i) opini wajar tanpa pengecualian (*unqualified opinion*), (ii) opini wajar dengan pengecualian (*qualified opinion*), (iii) opini tidak wajar (*adversed opinion*), dan (iv) pernyataan menolak memberikan opini (*disclaimer of opinion*).

9.1.12 Tata Kelola dan Kapasitas Pemerintahan Daerah

RPJPN 2005-2025 mengamanatkan bahwa dalam rangka mewujudkan Indonesia yang demokratis dan adil serta pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan, pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah perlu dimantapkan, serta kapasitas pemerintah daerah perlu dikembangkan melalui peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah, kapasitas aparatur pemerintah daerah, kapasitas keuangan pemerintah daerah, serta kapasitas lembaga legislatif daerah.

Gambaran umum mengenai kondisi saat ini terkait prioritas bidang tersebut di atas adalah sebagai berikut.

1. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintahan Daerah

Pada tahun 2007 Pemerintah telah menerbitkan dua peraturan pemerintah yang menjadi bagian penting bagi pelaksanaan pemerintahan, baik di pusat maupun di daerah, sebagai perwujudan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah. Kedua peraturan pemerintah tersebut adalah PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dan PP No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

Mengingat pentingnya peran kelembagaan pemerintah dalam konteks pembangunan daerah tersebut, sebagai tindak lanjut dari penerbitan PP No. 38 Tahun 2007, diperlukan pedoman mengenai organisasi perangkat daerah yang sinergis dengan urusan pemerintahan yang harus dilaksanakan. Peningkatan kapasitas kelembagaan ini bertujuan untuk memperbaiki kondisi kelembagaan pemerintah yang belum menunjukkan efisiensi dan efektivitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Kelembagaan yang efektif dan efisien di antaranya meliputi kejelasan tugas pokok dan fungsi tiap instansi tanpa adanya tumpang tindih, kelengkapan prosedur operasional, sistem koordinasi antarorganisasi pemerintah, serta pemenuhan sarana dan prasarana pemerintahan.

Pembentukan organisasi perangkat daerah telah diatur dalam PP No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Organisasi perangkat daerah merupakan unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari: sekretariat daerah (setda), sekretariat dewan (sekwan), dinas, lembaga teknis daerah (meliputi badan, kantor dan rumah sakit daerah) untuk wilayah provinsi, sedangkan untuk wilayah kabupaten/kota ditambah dengan kecamatan dan kelurahan. Lembaga pemerintah daerah yang terkait erat dengan penyelenggaraan pelayanan publik adalah dinas dan lembaga teknis daerah. Dalam PP No. 41 Tahun 2007, pengaturan terhadap organisasi perangkat daerah menekankan pada ketentuan jumlah dinas dan lembaga teknis daerah (tidak termasuk rumah sakit daerah). Keberadaan dinas dan lembaga teknis daerah di tiap provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia sendiri sangat bervariasi karena pembentukannya didasarkan pada kebutuhan tiap-tiap daerah. Sampai dengan pertengahan tahun 2009, sebanyak 28 pemerintah provinsi, 222 pemerintah kabupaten, dan 36 pemerintah kota telah memiliki organisasi perangkat daerah yang sesuai dengan PP No. 41 Tahun 2007.

2. Peningkatan Profesionalisme Aparatur Pemerintah Daerah

Jumlah keseluruhan aparatur pemerintah daerah di Indonesia (tidak termasuk pegawai negeri sipil pusat) berkisar 3 juta personel atau 1,3 persen dari jumlah penduduk Indonesia. Jika ditambah dengan jumlah PNS di Pusat, jumlahnya mencapai 1,7 persen dari seluruh jumlah penduduk. Jika dibandingkan dengan negara tetangga, persentase tersebut masih di bawah Thailand (2,81 persen), Singapura (3,67 persen), dan Brunei Darussalam (12,9 persen).

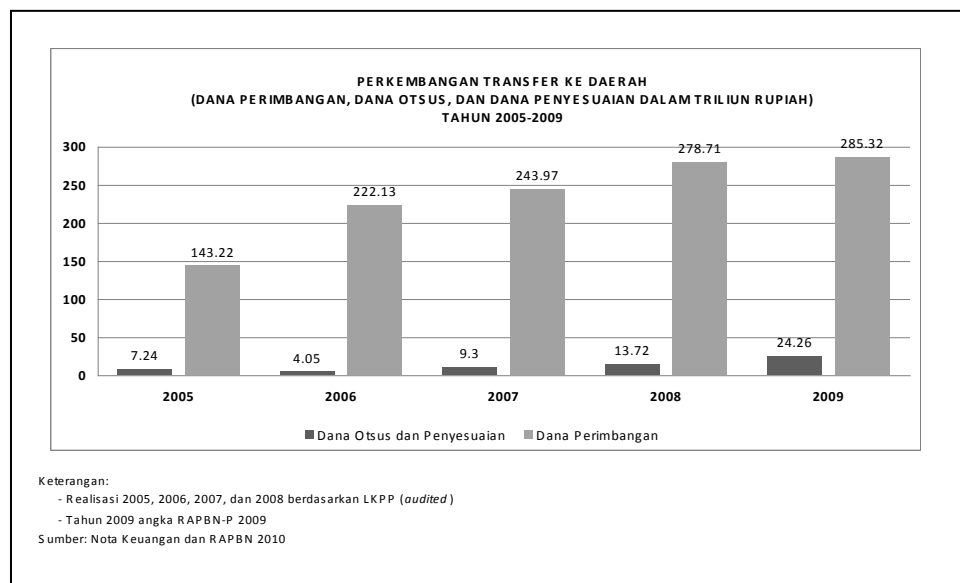
Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah telah banyak dilakukan, baik melalui pendidikan maupun pelatihan. Pelatihan tersebut diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan pemerintah daerah atau karena adanya kebijakan baru Pemerintah. Komponen-komponen penunjang pendidikan dan pelatihan (diklat) seperti kualitas pengajar, koordinasi dalam penyelenggaraan diklat, fasilitas diklat, dan sebagainya juga terus ditingkatkan. Namun, pengaturan atau pedoman dalam manajemen aparatur itu sendiri masih memerlukan penanganan yang lebih baik, termasuk perlunya dikembangkan standar kompetensi maupun pola mutasi untuk aparat pemerintah daerah. Pengaturan teknis ini diperlukan karena adanya tuntutan yang berbeda antara sebelum dan setelah diberlakukannya kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah.

3. Peningkatan Kapasitas Keuangan Daerah

Sejak berlakunya kebijakan otonomi daerah pada awal tahun 2001, sistem pemerintahan daerah di Indonesia mengalami perubahan, dari sistem sentralisasi ke sistem desentralisasi yang di dalamnya pemerintah daerah memiliki kewenangan yang lebih besar dalam proses perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan pembangunan di daerah.

Seiring dengan pengalihan sebagian besar urusan pemerintahan ke daerah, alokasi dana APBN yang ditransfer ke daerah juga meningkat secara signifikan. Dalam kurun waktu 2005—2009, dana APBN yang didaerahkan meningkat lebih dari 100 persen (Gambar 9.14). Dengan meningkatnya anggaran untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah, tuntutan untuk mewujudkan praktek pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik terus meningkat pula. Sebagai tindak lanjut dari amanat UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah kemudian mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Berdasarkan peraturan pemerintah tersebut, pengelolaan keuangan daerah meliputi keseluruhan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah tersebut merupakan subsistem dari dari sistem pengelolaan keuangan negara dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.

GAMBAR 9.14



Sebagai tindak lanjut PP No. 58 Tahun 2005, Depdagri telah mengeluarkan Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dan terakhir telah direvisi dengan Permendagri No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan ini khusus mengatur pengelolaan keuangan daerah yang baru, sesuai dengan arah reformasi tata kelola keuangan negara/daerah.

Dari segi kapasitas keuangan daerah, pada umumnya pemerintah daerah masih sangat bergantung pada dana perimbangan. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan pemanfaatan beberapa alternatif sumber penerimaan daerah di luar pajak dan retribusi daerah, yaitu pinjaman daerah, hasil pengelolaan aset daerah, hasil pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), dan hasil pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

9.2 Permasalahan dan Sasaran

9.2.1 Permasalahan

Permasalahan mendasar dalam pembangunan bidang kewilayahan dan tata ruang adalah belum optimalnya penyediaan basis analisis pembangunan wilayah, baik berupa data, informasi spasial, maupun pemetaan, serta belum optimalnya penyelenggaraan dasar perencanaan pembangunan wilayah, baik upaya-upaya dalam penataan ruang maupun pengelolaan pertanahan yang menjadi acuan dalam pembangunan wilayah di daerah. Pembangunan wilayah-wilayah tertinggal, perbatasan, kawasan strategis, kawasan rawan bencana, kawasan perkotaan, perdesaan, dan upaya-upaya pengembangan ekonomi lokal, belum optimal dilaksanakan dan perlu dipercepat dan dikerjakan dalam kerangka lintas sektor, lintas pelaku, dan lintas daerah. Berbagai upaya pemantapan desentralisasi dan perbaikan tata kelola pemerintah daerah pun belum optimal dilaksanakan untuk dapat mendukung proses pelaksanaan pembangunan wilayah di daerah.

Masalah mendasar tersebut digambarkan secara lebih jelas sebagai berikut.

9.2.1.1 Data dan Informasi Spasial

Data dan informasi spasial menjadi basis analisis dalam pembangunan berdimensi kewilayahan. Namun, masih terdapat beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. **Belum Optimalnya Koordinasi Kegiatan Survei Dan Pemetaan Nasional**

Pada saat ini, sesuai dengan Peraturan Presiden No. 85 Tahun 2007, terdapat 14 instansi Pemerintah dan beberapa satuan kerja di seluruh pemerintah daerah dan juga instansi swasta yang melakukan kegiatan survei dan pemetaan. Di antara instansi-instansi tersebut belum terdapat koordinasi yang baik sehingga seringkali terjadi kegiatan survei dan pemetaan yang tumpang-tindih pada daerah yang sama dengan metodologi teknis yang juga berbeda sehingga data dan informasi spasial yang dihasilkan secara nasional memiliki tingkat efisiensi dan efektifitas yang rendah.



Kegiatan survei dan pemetaan di instansi-instansi, khususnya instansi pemerintah belum terdefinisi secara jelas sehingga menyulitkan perencanaan anggaran survei dan pemetaan dan menjadi salah satu penyebab tumpang tindih kegiatan.

Di lingkungan pemerintah daerah, unit kerja yang melaksanakan kegiatan survei dan pemetaan belum mempunyai legalitas yang tetap dan masih dititipkan di satuan kerja pemerintah daerah sehingga unit kerja tersebut tidak mempunyai sumberdaya yang memadai.

Terkait dengan peraturan perundang-undangan, perihal data dan informasi spasial belum diatur dalam kerangka peraturan perundang-undangan yang lengkap dan komprehensif. Hal tersebut menyebabkan tiap-tiap instansi menyusun norma, standar, pedoman, dan kriteria (NSPK) sehingga interoperabilitas produk-produk data dan informasi spasial yang dihasilkan menjadi rendah.

NSPK yang sudah ada dan telah distandarisasikan dalam Standar Nasional Indonesia (SNI) pun belum sepenuhnya diterapkan. Standar metadata yang dapat dipergunakan secara nasional belum tersedia, terkecuali standar metadata pada tingkat global yang telah banyak digunakan oleh komunitas data geospasial.

2. Belum Memadainya Data Dan Informasi Spasial

Dari segi kuantitas, data dasar berupa peta rupa bumi Indonesia pada skala 1:100.000, 1:50.000, dan 1:25.000 yang amat diperlukan bagi penyusunan RTRW provinsi, kabupaten/kota, cakupan yang tersedia belum mencakup seluruh wilayah nasional. Beberapa data dan informasi tematik pokok seperti kehutanan, perhubungan, dan lain-lain juga memiliki daerah liputan yang belum mencakup seluruh wilayah nasional.

Sementara dari segi kualitas, data dasar dan peta dasar yang idealnya harus divalidasi setiap 20 tahun untuk peta dasar dan 5 tahun untuk peta tematik belum sepenuhnya dilakukan, terkecuali untuk wilayah tertentu yang perkembangan wilayah yang sangat pesat telah dilakukan validasi, seperti wilayah Sumatera yang sudah terpetakan dengan menggunakan foto udara tahun 1976 akan dipetakan kembali pada tahun 2010. Di samping itu, semua data yang tersedia tersebut belum mengacu kepada satu standar nasional dan satu peta dasar sehingga data tersebut sulit untuk diintegrasikan.

3. Belum Memadainya Akses Terhadap Data Dan Informasi

Akses data informasi spasial dengan menggunakan internet masih sangat terbatas dan secara umum masih menggunakan cara konvensional melalui pertukaran langsung dengan media *portable disc*.

Akses terhadap data juga disebabkan oleh kebijakan di lingkungan instansi tempat data spasial yang dibuat oleh instansi diperlukan untuk lingkungan internal sehingga tidak ada kebijakan untuk disebarluaskan kepada pihak eksternal. Informasi tentang data informasi spasial (metadata) juga masih sangat terbatas pada tiap-tiap instansi pembuat data informasi bersangkutan. Sebagian besar instansi, terutama pemerintah daerah, belum memahami dan menyusun metadata dengan baik.

4. **Kurangnya Sumberdaya Manusia Di Bidang Survei Dan Pemetaan**

Sumberdaya manusia di bidang survei dan pemetaan secara nasional masih sangat terbatas baik jumlah maupun penyebarannya. Dari jumlah yang terbatas tersebut, sebagian besar masih terkonsentrasi di lingkungan instansi pusat dan provinsi, seperti beberapa ibukota provinsi berikut: Jakarta, Bandung, Surabaya, Medan, Makasar, dan Yogyakarta. Sementara itu, di instansi kabupaten dan kota, kondisi sumberdaya manusia belum memadai. Diperkirakan di instansi pemerintah kabupaten dan kota, baru terdapat 1.000 orang atau sekitar 10 persen dari jumlah ideal yang dibutuhkan.

9.2.1.2 Penataan Ruang

Untuk dasar perencanaan pembangunan nasional dan sektoral, dibutuhkan rencana tata ruang yang mantap. Permasalahan yang dihadapi untuk penyelenggaraan penataan ruang itu adalah sebagai berikut.

1. **Pengaturan Penataan Ruang**

Masalah yang menyangkut pengaturan penataan ruang adalah:

- a. belum selesainya penyusunan seluruh peraturan perundang-undangan sebagai pelaksanaan amanat UU No. 26 Tahun 2007, yang mencakup PP tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, Perpres tentang RTR Pulau dan KSN, Perda tentang RTRW Provinsi, Kabupaten dan Kota di Indonesia, dan NSPK terkait; dan
- b. belum tersusunnya aturan dalam bentuk Peraturan Pemerintah hingga Peraturan Menteri yang mensinkronkan pelaksanaan UU No. 26 Tahun 2007 dengan UU sektoral seperti kehutanan, pertanian, pertambangan, transportasi, pengairan, penanaman modal, pertanahan, dan lain-lain.

2. **Pembinaan Penataan Ruang**

Masalah yang menyangkut pembinaan penataan ruang adalah:

- a. belum optimalnya kapasitas kelembagaan yang mencakup kuantitas dan kualitas SDM di pusat dan daerah, dan masih terbatasnya penyediaan sistem informasi dan data bidang tata ruang;

- b. masih kurangnya pemahaman mengenai UU No. 26 Tahun 2007 oleh pemangku kepentingan terkait di pusat dan daerah, yang disebabkan oleh kurangnya sosialisasi dan advokasi khususnya mengenai NSPK dan aturan pelaksanaannya; dan
- c. koordinasi penyelenggaraan penataan ruang antarsektor dan antarwilayah masih perlu ditingkatkan dengan lebih mengoptimalkan peran BKPRN dan BKPRD dalam penyelenggaraan penataan ruang.

3. **Perencanaan Tata Ruang**

Masalah yang terkait dengan perencanaan tata ruang adalah:

- a. masih diperlukan percepatan pengesahan Perda RTRW sesuai dengan amanat UU No. 26 Tahun 2007 sebagai acuan pelaksanaan pembangunan;
- b. penyusunan RTR belum didasarkan pada kualitas dan kuantitas data yang memadai, peta dasar dan peta tematik yang up-to-date, serta NSPK yang telah dilegalisasi; dan
- c. masih perlu ditingkatkannya alokasi anggaran daerah untuk penyusunan RTRW Provinsi, Kabupaten/Kota yang selain mengakomodasi proses teknokratik, juga perlu mengakomodasi proses politis dan pelibatan masyarakat.

4. **Pemanfaatan Ruang**

Masalah yang terkait dengan pemanfaatan ruang adalah:

- a. belum adanya sinkronisasi program pembangunan antar sektor dan antar wilayah yang mengacu kepada RTR sehingga masih ditemukan adanya konflik antar sektor dan antar wilayah; dan
- b. masih adanya penyimpangan penggunaan lahan terhadap RTRW yang dicerminkan dari tingkat kesesuaian penggunaan tanah terhadap RTRWP telah mencapai 68,31 persen dari luas wilayah Indonesia atau 130,66 juta hektar .

5. **Pengendalian Pemanfaatan Ruang**

Masalah yang terkait dengan pengendalian pemanfaatan ruang adalah belum tersedianya instrumen pengendalian yang optimal, mekanisme perizinan yang mengacu kepada RTRW, dan petunjuk pelaksanaan pemberian sanksi terhadap pelanggaran RTRW.

6. **Pengawasan Penataan Ruang**

Masalah yang terkait dengan pengawasan penataan ruang adalah belum terbentuknya Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Penataan Ruang yang

mencukupi untuk meningkatkan fungsi pengawasan dalam penataan ruang yang didukung oleh SDM dan ketersediaan NSPK.

9.2.1.3Pertanahan

Upaya pengembangan wilayah memerlukan dukungan penerapan sistem pengelolaan pertanahan yang efisien, efektif, serta penegakan hukum terhadap hak atas tanah dengan menerapkan prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan demokrasi. Beberapa kondisi yang membutuhkan perhatian dan penanganan dalam upaya menjadikan tanah sebagai salah satu sumber perbaikan kesejahteraan masyarakat adalah sebagai berikut.

1. Belum Kuatnya Jaminan Kepastian Hukum Hak Masyarakat Atas Tanah

Keterbatasan ketersediaan peta dasar untuk pendaftaran tanah merupakan salah satu kendala utama yang perlu diatasi. Data yang ada menunjukkan bahwa dari 39.681.839 bidang tanah yang telah terukur dan terdaftar, 10 persen sudah dipetakan secara jelas koordinatnya. Disamping itu, dengan mencermati kian tingginya tuntutan penggunaan teknologi informasi dalam pengelolaan pertanahan, peta dasar yang merupakan infrastruktur utama pendaftaran tanah juga perlu dituangkan dalam bentuk digital.

2. Masih Terjadinya Ketimpangan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (P4T)

Meskipun telah dilakukan upaya penataan P4T, masih terindikasi tanah terlantar seluas 7.300.000 hektar. Di sisi lain, rata-rata penguasaan tanah kurang dari 0,5 hektar per rumah tangga petani masih belum cukup memadai untuk mencapai skala usaha pertanian. Dengan demikian, penataan P4T perlu ditingkatkan efektivitasnya untuk memperkecil resiko sengketa tanah, mengurangi kesenjangan penguasaan tanah serta menanggulangi kemiskinan, terutama di perdesaan.

Disamping itu, upaya redistribusi tanah perlu dilanjutkan dan diperbaiki dengan memperhatikan bahwa legalisasi aset tanah tidak serta merta meningkatkan taraf hidup penerima redistribusi tanah. Untuk itu, diperlukan penyiapan yang matang sebelum tahap sertifikasi, serta adanya akses terhadap sumber daya produktif setelah diperolehnya sertifikat tanah.

Selanjutnya berdasarkan Neraca Penatagunaan Tanah (PGT) di 93 kabupaten, yang membandingkan penggunaan tanah dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), tercatat sekitar 31 persen luas tanah yang penggunaannya belum sesuai dengan RTRW. Ketidaksesuaian dengan RTRW dapat berpotensi meningkatkan ketidakpastian dalam penggunaan dan pemanfaatan tanah.

3. Kinerja Pelayanan Pertanahan Yang Belum Optimal

Peningkatan kinerja pelayanan pertanahan masih menghadapi kendala sistem informasi pertanahan yang belum memadai kualitasnya, baik dari aspek keamanan data yuridis maupun aspek kenyamanan pelayanan. Selain itu, masih diperlukan penguatan kapasitas sumber daya manusia di bidang pertanahan, yang mencakup kemampuan teknis, profesionalisme serta penerapan tata pemerintahan yang baik.

4. Penataan Dan Penegakan Hukum Dalam Pengelolaan Pertanahan Belum Memadai

Ketidaksesuaian antar peraturan perundangan yang terkait dengan tanah masih menjadi kendala utama baik dalam mewujudkan kepastian hukum hak atas tanah maupun dalam menyelesaikan serta mencegah kasus pertanahan. Ketetapan MPR No. IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam juga telah mengamanatkan pengkajian peraturan dalam rangka sinkronisasi kebijakan antarsektor. Oleh karena itu, penataan dan penegakan hukum dalam pengelolaan pertanahan perlu dilakukan secara optimal.

9.2.1.4 Perkotaan

Pembangunan perkotaan akan menghadapi beberapa masalah dan tantangan dalam 2010—2014. Belum lengkapnya kebijakan yang mendukung pembangunan perkotaan dan kurangnya sinkronisasi peraturan perundangan yang terkait pembangunan perkotaan menjadi masalah pokok mendasar dalam upaya mengatasi masalah-masalah di perkotaan. Secara spesifik, masalah-masalah di perkotaan yang masih harus dihadapi adalah sebagai berikut.

1. Tingginya Kemiskinan di Perkotaan

Dampak pesatnya urbanisasi, menyusul berkembangnya kota-kota besar dan metropolitan sebagai *engine of growth* adalah kemiskinan dan kawasan kumuh. Pada tahun 2000, sebanyak 1,2 juta penduduk perkotaan tinggal di kawasan kumuh (PJM, Permukiman dan Perumahan 2000-2004, dalam Laporan Akhir Kajian Penanganan Permukiman Kumuh di Indonesia, 2008). Data menunjukkan bahwa pada tahun 2008, jumlah penduduk miskin di perkotaan adalah sebesar 12,77 juta penduduk (36,5 persen dari total penduduk miskin di Indonesia). Besarnya jumlah penduduk miskin di perkotaan ini disebabkan oleh jumlah lapangan pekerjaan yang tidak memadai. Masalah ini diperberat dengan kualitas tenaga kerja yang tidak memenuhi persyaratan lapangan kerja yang tersedia. Berdasarkan data keadaan angkatan kerja di Indonesia tahun 2008, diketahui bahwa jumlah pengangguran pada angkatan kerja di perkotaan adalah sebesar 5.702.250 jiwa pada tahun 2006, 5.624.533 jiwa pada tahun 2007 dan 5.240.887

jiwa pada tahun 2008, dengan jumlah pengangguran terbesar berada pada kelompok angkatan kerja berpendidikan SMU dan SMP.

Selain itu, pembangunan di perkotaan pada umumnya tidak memberikan ruang bagi pengembangan sektor informal. Hingga saat ini sektor informal terutama pedagang kaki lima masih banyak menempati ruang-ruang publik di perkotaan yang tidak diperuntukkan untuk kegiatan perdagangan seperti di trotoar, badan jalan, sempadan sungai, taman kota, dan sempadan rel kereta api.

2. Tingginya Kerawanan Sosial di Perkotaan

Berdasarkan Laporan Statistik Kriminal tahun 2007, diketahui bahwa persentase penduduk yang pernah menjadi korban kejahatan di perkotaan adalah sebesar 1,3 persen, sedangkan di perdesaan 1,0 persen. Sementara itu, hampir separuh (49,8 persen) jumlah tindak pidana yang tercatat pada tahun 2006 terjadi di wilayah Pulau Jawa, yang menjadi konsentrasi wilayah perkotaan di Indonesia. Begitu pula dengan jumlah terbanyak penderita HIV/AIDS yang hingga Desember 2008 berada pada Provinsi Jawa Barat, Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Jawa Timur. Jumlah kasus narkoba di Indonesia juga mengalami peningkatan yaitu dari sebanyak 22.630 kasus pada tahun 2007 menjadi 29.364 kasus pada tahun 2008 atau meningkat sebesar 29,7 persen.

3. Rendahnya Modal Sosial dan Budaya Masyarakat Perkotaan

Rendahnya interaksi sosial masyarakat perkotaan terutama di kota-kota besar/metropolitan disebabkan oleh terbatasnya ruang publik yang terjangkau. Di lain pihak, keterbatasan ruang publik di perkotaan juga menyebabkan berkurangnya pengenalan kegiatan warisan budaya di perkotaan.

4. Lemahnya Kelembagaan dan Kerjasama dalam Membangun Keterkaitan Pengelolaan Sektor Publik Antar Kota

Meningkatnya pembangunan infrastruktur pelayanan publik di kota-kota besar di era otonomi daerah menciptakan konflik dalam pengelolaan perkotaan, khususnya pada pengelolaan sarana dan prasarana perkotaan yang sifatnya lintas wilayah, seperti transportasi, air bersih, dan persampahan. Konflik kepentingan antarwilayah ini dapat disebabkan oleh kurang adanya upaya optimal untuk melaksanakan pengelolaan secara terpadu yang didukung dengan lembaga pengelolaan perkotaan yang dapat berfungsi penuh untuk mengelola konflik dan urusan yang sifatnya lintas kota atau lintas wilayah.

Inisiasi kerjasama antarkota sudah dimulai pada sektor-sektor tertentu, seperti sektor pelayanan publik dan pengembangan ekonomi regional, namun masih diperlukan adanya mekanisme kelembagaan antardaerah yang mampu menangani masalah-masalah yang dihadapi bersama pada kawasan metropolitan. Pengelolaan perkotaan terpadu yang belum terwujud hingga saat ini juga disebabkan oleh tidak adanya sistem informasi tata ruang antarkota dan

antarkota-desa. Di samping itu, pembangunan kota-kota yang hirarkis juga belum sepenuhnya terwujud sehingga pemerintah belum dapat memberikan pelayanan yang efektif dan optimal bagi wilayah pengaruhnya. Kota-kota kecil dan menengah belum dapat berperan secara efektif sebagai pusat pertumbuhan bagi wilayah sekitarnya.

5. Masih Lemahnya Kapasitas Pemerintah Kota dalam Perencanaan dan Penyelenggaraan Pembangunan dan Pengelolaan Perkotaan serta Penerapan Prinsip Tata Pemerintahan yang Baik

Belum optimalnya pelaksanaan *urban management* dan *urban governance* oleh pemerintah daerah, dikarenakan oleh masih kurangnya kemampuan/kapasitas pemerintah daerah dalam melaksanakan perencanaan, pembiayaan, diseminasi informasi, kepemimpinan, pengembangan kapasitas, transparansi, akuntabilitas, partisipasi dalam pengelolaan pelayanan perkotaan (pengelolaan sampah, drainase, sanitasi, air bersih, dsb). Masih rendahnya penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas dan partisipasi (TAP) oleh pemerintah kota dalam pengelolaan perkotaan saat ini di antaranya dapat ditunjukkan oleh jumlah kota yang telah menerapkan layanan e-procurement. Berdasarkan data dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP), hingga 14 Desember 2009 hanya 13 kota yang telah berhasil menerapkan *e-procurement* (dengan menggunakan aplikasi dari LKPP), dan 7 kota yang sedang dalam tahap persiapan penerapan *e-procurement*. Data tersebut menunjukkan bahwa penerapan prinsip TAP dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah kota masih belum optimal. Sebagian besar kota telah memiliki laman (*website*), namun penggunaan laman tersebut belum optimal karena belum semua laman digunakan untuk menjangkau aspirasi masyarakat.

Aparatur pemerintah daerah juga dinilai belum optimal mengembangkan kemitraan dengan swasta dalam pengelolaan perkotaan. Selain itu, aparatur pemerintah daerah dinilai belum optimal dalam menyelenggarakan pengelolaan perkotaan yang sesuai dengan perencanaan pengelolaan perkotaan, karena belum adanya pedoman baku yang mengatur mengenai penyelenggaraan pengelolaan perkotaan, serta rendahnya implementasi rencana tata ruang perkotaan dan pengendalian pemanfaatan ruang perkotaan.

6. Belum Optimalnya Penanganan Polusi Lingkungan dan Mitigasi Bencana dalam Pengelolaan Perkotaan

Kawasan perkotaan akan semakin menghadapi kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun. Dengan perubahan iklim yang semakin cepat, kota-kota di Indonesia akan menjadi lebih rentan. Menurut penelitian UNDP tahun 2007, risiko dari perubahan iklim tersebut akan berakibat pada terjadinya krisis air baku, sanitasi, energi, pangan, bahkan peningkatan risiko banjir. Selain itu,

antisipasi terhadap bencana juga tidak kalah pentingnya, mengingat kondisi geografis kota di Indonesia sangat rentan terhadap bencana alam.

Selain menghadapi bencana alam, kawasan perkotaan juga harus menghadapi pencemaran lingkungan baik pencemaran udara, air maupun tanah. Di kota-kota metropolitan seperti Jakarta, Bandung, Medan dan Surabaya, jumlah hari dengan kualitas udara kategori baik kurang dari 40 persen (Status Lingkungan Hidup tahun 2008). Kualitas udara juga dapat dilihat dari derajat keasaman air hujan. Dari 14 stasiun pengamatan hujan asam tercatat hanya 4 stasiun yang sampel air hujannya mempunyai derajat keasaman normal. Kondisi ini menunjukkan bahwa hujan asam sudah terjadi di seluruh wilayah Indonesia. Selain itu sebagian besar sungai di Indonesia juga sudah tercemar. Hasil pemantauan yang dilakukan pada tahun 2008 oleh 30 Bapedalda Provinsi terhadap 35 sungai di Indonesia menunjukkan bahwa status mutu air pada umumnya sudah tercemar berat (Status Lingkungan Hidup tahun 2008).

Beberapa upaya pengendalian pencemaran lingkungan telah dilaksanakan, namun upaya-upaya tersebut belum terintegrasi di dalam perencanaan pengelolaan perkotaan. Kementerian Lingkungan Hidup di antaranya telah melaksanakan Program Kali Bersih (PROKASIH) yang merupakan program pengendalian pencemaran air secara terpadu untuk menurunkan beban pencemaran air pada sumbernya. Program ini dilaksanakan melalui kerjasama dengan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota, antara lain dengan penandatanganan Surat Pernyataan (SUPER) tentang kesediaan 341 perusahaan industri untuk mentaati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup dalam batas waktu yang disepakati bersama (tahun 2003-2008). Selain itu, berdasarkan penilaian kinerja Kementerian Negara Lingkungan Hidup terhadap pengelolaan lingkungan pada 679 perusahaan yang terdiri dari 242 industri manufaktur, 15 industri jasa dan kawasan industri, 222 industri agro, dan 200 industri PEM (pertambangan, energi, dan migas), terdapat hanya 205 perusahaan yang masuk dalam kategori taat dalam pengendalian pencemaran air, dan hanya 10 perusahaan industri jasa dan kawasan industri yang masuk dalam kategori taat. Dalam hal ini masih diperlukan dukungan penegakan hukum yang jelas dan tegas, yang menjadi bagian tak terpisahkan dalam penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan perkotaan.

Ancaman perubahan iklim bagi keberlangsungan kehidupan di perkotaan juga menjadi suatu masalah yang nyata. Kota-kota metropolitan di Indonesia yang pada umumnya berada di muara sungai besar/tepi pantai menghadapi ancaman dampak perubahan iklim secara langsung. Hingga saat ini belum ada kebijakan dan strategi nyata yang diterapkan untuk mengantisipasi dampak perubahan iklim.

7. Belum Optimalnya Investasi dan Pengembangan Ekonomi di Perkotaan

Belum optimalnya investasi dan pengembangan ekonomi di perkotaan ditandai dengan belum dimanfaatkannya potensi ekonomi lokal dan belum berkembangnya industri kreatif untuk membangun ekonomi perkotaan, kurangnya dukungan iklim investasi yang berpihak kepada kota-kota menengah, serta rendahnya kapasitas aparatur pemerintah kota dalam pengembangan dan pengelolaan ekonomi perkotaan. Data PDRB atas harga berlaku tahun 2004-2007 menunjukkan bahwa pertumbuhan PDRB paling besar masih terdapat pada kota-kota metropolitan, yaitu sebesar 56,13 persen, diikuti dengan kota besar sebesar 52,52 persen, kota menengah sebesar 48,5 persen, dan kota kecil sebesar 44,75 persen. Sementara itu, kota yang jumlah penduduknya sangat kecil sehingga tidak memenuhi klasifikasi sebagai kota kecil (Kota Padang Panjang dan Kota Sabang) justru menunjukkan persentase pertumbuhan yang lebih tinggi, yaitu sebesar sebesar 52 persen. Laporan Badan Koordinasi Penanaman Modal pada Februari 2009 menunjukkan bahwa realisasi PMA dan PMDN terkonsentrasi di Pulau Jawa-Bali, Pulau Sumatera, Pulau NTB, Provinsi Kalimantan Selatan dan Provinsi Kalimantan Timur. Hal tersebut menunjukkan bahwa iklim investasi pada kota-kota di luar Pulau Jawa di Kawasan Indonesia Timur masih jauh tertinggal bila dibandingkan dengan kota-kota di Pulau Jawa.

8. Rendahnya Ketersediaan dan Kualitas Pelayanan Publik di Perkotaan

Kurangnya pelayanan publik yang memadai bagi seluruh penghuni kota juga menjadi masalah yang tidak pernah selesai, baik di kota-kota besar dan metropolitan maupun di kota kecil dan menengah. Dari mulai masalah transportasi kota, pelayanan dasar dan sarana prasarana perkotaan, selalu dihadapkan pada penyediaan dan pengelolaan yang kurang terintegrasi satu dengan lainnya. Belum lagi bila pengelolaan tersebut meliputi air baku, tempat pembuangan akhir sampah, pengendalian banjir, dan drainase yang memerlukan kerjasama lintas wilayah.

Rendahnya kualitas pelayanan publik di perkotaan ditandai dengan buruknya tingkat pelayanan jalan di kota-kota Indonesia. Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada 10 kota metropolitan dan 2 kota besar oleh Kementerian Negara Lingkungan Hidup pada tahun 2007 (Laporan Evaluasi Kualitas Udara Perkotaan Tahun 2007 Program Langit Biru), diketahui bahwa tingkat pelayanan jalan (kemampuan ruas jalan dan/atau persimpangan untuk menampung lalu lintas pada keadaan tertentu) pada 12 kota tersebut termasuk kedalam kelompok D dan E, yang berarti volume kendaraan sudah hampir sama dengan kapasitas jalan, yang berakibat pada rendahnya kecepatan kendaraan (kemacetan).

Selain itu, dalam pelayanan air minum, hanya 42,4 persen rumah tangga di perkotaan yang memiliki akses kepada air minum leding dan kemasan (Indikator Kesejahteraan Rakyat tahun 2007). Dalam pelayanan drainase, hanya 52,83

persen rumah tangga yang memiliki saluran drainase yang mengalir lancar, sebanyak 14,29 persen rumah tangga memiliki saluran drainase mengalir lambat/tergenang, dan 32,68 persen rumah tangga tidak memiliki saluran drainase (BPS, 2007). Berdasarkan Susenas tahun 2007, penduduk perkotaan yang memiliki akses terhadap prasarana dan sarana sanitasi setempat (*on-site*) yang aman (tangki septik) baru 71,06 persen dan penduduk perkotaan yang terlayani sanitasi terpusat (*sewerage* dan *wastewater treatment plant /IPAL*) baru mencapai 2,33 persen.

Berdasarkan data Status Lingkungan Hidup 2008 (Kemen LH) dengan jumlah penduduk yang lebih besar, kota-kota metro menghasilkan sampah yang lebih besar jika dibandingkan dengan kota-kota lainnya di Indonesia. Kota-kota tersebut adalah Medan, Palembang, Jakarta, Depok, Tangerang, Bekasi, Bandung, Surabaya, Semarang dan Makasar. Jumlah sampah rata-rata per hari kota tersebut meningkat setiap tahun. Yang mempengaruhinya adalah jumlah penduduk yang meningkat dan penanganan sampah di tiap-tiap kota. Dalam hal pengelolaan sampah, selama ini penanganan dan pengolahan sampah hanya sekedar mengangkut dan membuang hingga Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Sementara itu, kondisi TPA di berbagai kota di Indonesia pada umumnya tidak memadai (Status Lingkungan Hidup tahun 2008).

Rendahnya kualitas pelayanan publik perkotaan ini di antaranya disebabkan oleh terbatasnya anggaran pemerintah kota untuk pembangunan sarana dan prasarana pelayanan perkotaan. Rendahnya investasi swasta dalam penyediaan pelayanan publik juga berkontribusi dalam pelayanan publik perkotaan.

9. Rendahnya Implementasi Rencana Tata Ruang Perkotaan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Perkotaan

Rendahnya implementasi rencana tata ruang perkotaan dan pengendalian pemanfaatan ruang perkotaan ditandai dengan makin terbatas dan mahalnya lahan yang tersedia untuk fungsi-fungsi perkotaan, serta kekurangterpaduan antara perencanaan spasial, perencanaan guna lahan dan perencanaan transportasi di perkotaan. Diperlukan upaya-upaya pengendalian pemanfaatan ruang perkotaan yang lebih optimal untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut.

9.2.1.5 Perdesaan

Pembangunan perdesaan menghadapi masalah-masalah, antara lain, belum optimalnya kebijakan dan program-program dari berbagai sektor yang berpengaruh baik langsung maupun tidak langsung terhadap kehidupan masyarakat perdesaan, belum optimalnya koordinasi antarpemerintah desa dan kabupaten/kota serta berkembangnya mekanisme koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan termasuk K/L dalam pembangunan perdesaan serta masih belum optimalnya



keberpihakan dari kepemimpinan lokal dan kelembagaan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah dalam pembangunan perdesaan.

Secara spesifik, masalah-masalah yang dihadapi dan perlu diselesaikan adalah sebagai berikut

1. Belum Optimalnya Peran Kelembagaan

a. Masih lemahnya kemandirian desa.

Sebagian besar desa masih tergantung kepada layanan pemerintah, dan masih sekitar 40 persen desa yang berpredikat miskin dan tertinggal. Ketidakmandirian desa bersumber pada beberapa hal, misalnya keterbatasan aset dan akses desa terhadap sumberdaya lokal, serta inisiatif dan kapasitas lokal yang lemah. Selain itu, masih lemahnya pelaksanaan UU No. 32/2004 di antaranya tentang kewenangan asal-usul (desa adat atau masyarakat adat) yang membutuhkan pengakuan dari negara.

b. Masih lemahnya perencanaan pembangunan desa

Perencanaan Pembangunan Desa belum optimal karena kapasitas desa yang masih terbatas dan belum sinergi dan terintegrasinya program-program pemberdayaan dari pemerintah (PNPM) dengan perencanaan desa tersebut. Sementara proses Musrenbang untuk menyusun perencanaan desa reguler berlangsung kurang partisipatif dan lebih banyak berisi daftar keinginan yang diajukan kepada pemerintah.

c. Lemahnya kapasitas pemerintah desa, lembaga-lembaga desa dan lembaga-lembaga kemasyarakatan

Sebagian besar desa memiliki kemampuan yang terbatas dalam mengelola pemerintahan dan pembangunan. Ada banyak desa yang belum memiliki kantor desa dengan fasilitas dan administrasi yang tidak memadai. Kondisi ini menyebabkan pelayanan administrasi yang kurang optimal, dan bahkan tidak tertanganinya dengan baik berbagai tugas pembantuan dari pemerintah untuk kegiatan pendataan.

Masih banyak kepala desa dan perangkat desa yang memiliki tingkat kesejahteraan sangat memprihatinkan, misalnya hanya menerima gaji di bawah upah minimum kabupaten, walaupun telah diamanatkan dalam PP 72/2004 paling sedikit sama dengan upah minimum regional kabupaten. Hal ini terjadi karena kapasitas keuangan kabupaten yang terbatas dan ketiadaan pendapatan asli desa (PADes). Rendahnya kesejahteraan kepala desa dan perangkat desa inilah yang menyebabkan jabatan-jabatan desa itu tidak menarik khususnya untuk desa di luar Jawa, dan perangkat desa yang sedang bertugas juga kurang optimal dalam menjalankan fungsi-fungsinya.

Sebagian besar kepala desa juga memiliki kapasitas kepemimpinan, pemerintahan dan pembangunan yang lemah. Visi, misi, dan tugas pokok dan fungsi hanya dipahami oleh sebagian kepala desa. Hal serupa juga dialami oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan lembaga-lembaga kemasyarakatan sehingga fungsi legislasi, aspirasi dan kontrol untuk membangun tata pemerintahan desa yang baik belum optimal dijalankan.

- d. Lemahnya kapasitas pemerintah daerah dalam mengatur dan mengurus desa

Belum semua pemerintah kabupaten menjalankan secara konsisten arah kebijakan dan program pengembangan otonomi desa atau desa mandiri. Sebagian besar kabupaten belum melakukan penyerahan urusan kepada desa sebagaimana diamanatkan oleh UU No. 32/2004, PP No. 72/2005 dan Permendagri No. 30/2006. Karena belum ada penyerahan urusan yang menjadi kewenangan desa, penyusunan perencanaan pembangunan desa hanya didasarkan pada kebiasaan dan kebutuhan-kebutuhan berskala desa yang mampu ditangani oleh desa.

Sejauh ini baru sekitar 60 persen kabupaten/kota yang mengalokasikan ADD kepada desa, dan dari yang sudah mengalokasikan, sebagian besar tidak mengikuti prinsip-prinsip dalam PP No. 72/2005, di antaranya adalah masih diberlakukannya secara ketat pola *specific grant* oleh kabupaten/kota dan masih adanya desa-desa yang belum tersentuh oleh sosialisasi kebijakan serta pembinaan dan pengawasan dari pemerintah kabupaten.

2. Rendahnya Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Masyarakat Perdesaan

Rendahnya kualitas sumber daya manusia ditandai oleh tingkat pendidikan dan keterampilan yang rendah sehingga dapat mempengaruhi tingkat keberdayaan masyarakat. Penduduk desa yang memiliki tingkat pendidikan yang relatif baik banyak bermigrasi terutama ke daerah perkotaan. Angka melek huruf di perdesaan untuk penduduk berusia 15 tahun ke atas 88,77 persen dan rata-rata lama sekolah hanya mencapai 6,2 tahun (BPS, 2007). Rendahnya kualitas SDM perdesaan juga dapat dilihat dari tingkat pendidikan yang ditamatkan. Pada tahun 2007, hanya 28,7 persen penduduk perdesaan usia 10 tahun ke atas yang memiliki ijazah minimal SMP (BPS, 2007). Selain itu buta aksara juga didominasi oleh kaum perempuan yaitu sebanyak 64 persen dari total angka buta aksara. Ditinjau dari akses pelayanan kesehatan, tercermin tingginya angka kesakitan yang mencapai 19 persen (BPS, 2007), balita mengalami gizi kurang dan buruk 30,07 persen, serta balita yang tidak pernah mendapat imunisasi 8,4 persen (BPS, 2007). Di samping itu, semakin tingginya risiko/kerentanan masyarakat terhadap penularan virus HIV dan AIDS serta penyakit menular lainnya ke perdesaan. Faktor utama yang menjadi kendala upaya peningkatan pendidikan dan kesehatan adalah masalah kemiskinan, pengetahuan serta tingkat kesadaran

masyarakat yang masih rendah. Selain itu, akses pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat perdesaan masih terbatas atau mahal.

3. **Terbatasnya Alternatif Lapangan Kerja Berkualitas**

Lapangan kerja berkualitas baik di pertanian maupun kegiatan ekonomi di luar pertanian seperti industri kecil yang mengolah hasil pertanian maupun kerajinan serta jasa penunjang lainnya masih sangat terbatas. Sulitnya mencari pekerjaan dengan upah yang memadai di perdesaan menyebabkan lebih dari separuh desa atau 39.913 desa (Podes 2008) yang sebagian masyarakatnya bekerja ke luar negeri (TKI).

4. **Rendahnya Akses terhadap Permodalan**

Rendahnya akses terhadap permodalan, akan menghambat peningkatan sumber pendapatan masyarakat perdesaan sekaligus menurunkan produktivitas petani. Salah satu penyebab rendahnya produktivitas petani di perdesaan adalah ketergantungan yang tinggi pada sektor pertanian. Menurut data Sakernas (Februari 2009) 62,1 persen pekerja di perdesaan bergantung pada sektor pertanian. Sementara itu, diketahui bahwa masih terdapat petani memiliki sedikit tingkat penguasaan lahan. Dari posisi kredit usaha kecil (yang berpotensi menjangkau pelaku usaha perdesaan), hanya mencapai 13,13 persen dari total kredit pada bank umum (BI, 2008). Di sisi lain, potensi kolateral yang dimiliki rumah tangga perdesaan juga rendah.

5. **Rendahnya Ketersediaan dan Akses terhadap Sarana Prasarana**

- a. Masih rendahnya tingkat **pelayanan sarana prasarana sosial** seperti pendidikan dan kesehatan, terutama sarana kesehatan di wilayah terpencil, perbatasan, dan pulau-pulau kecil terdepan (terluar), yang terkendala dengan kurangnya dan tidak lengkapnya peralatan kesehatan dan obat-obatan yang dimiliki dan tingkat pelayanan yang baik. Keberadaan puskesmas diperlukan untuk mendekatkan pelayanan di tingkat desa.
- b. Belum memadainya **fasilitas komunikasi dan informasi** yang akan memperlancar dan mempercepat pembangunan di perdesaan. Rumah tangga perdesaan yang memiliki akses sambungan telepon masih sangat rendah, yaitu 3,72 persen. Hambatan ini sebenarnya diatasi dengan penggunaan telepon selular, tetapi ternyata baru 24,33 persen rumah tangga di perdesaan yang menggunakan fasilitas ini. Akses internet di perdesaan juga masih sangat rendah. Hanya baru 1,26 persen rumah tangga yang bisa memanfaatkannya (BPS, 2007).
- c. Belum memadainya **ketersediaan prasarana transportasi perdesaan**. Masih terdapat 11.471 desa yang hanya memiliki jalan tanah dan 8.315 desa bahkan tidak memiliki jalan yang dapat dilalui kendaraan roda empat (BPS-Podes, 2008). Di samping itu, akses masyarakat perdesaan terhadap jalan

yang menghubungkan perdesaan dengan pusat-pusat distribusi dan pemasaran masih belum memadai.

- d. Masih belum memadainya **ketersediaan energi dan kelistrikan**. Di perdesaan, hanya terdapat 86,1 persen rumah tangga yang menggunakan penerangan listrik (BPS, 2007). Di samping itu, pengelolaan energi terbarukan masih belum berkembang.
- e. Masih belum memadainya **kualitas lingkungan hunian serta sarana dan prasarana permukiman**. Belum memadainya tempat pembuangan sampah di perdesaan, sehingga masih terdapat 14.948 desa yang membuang sampah di sungai, 9.891 desa yang memiliki tempat sampah kemudian diangkut, dan 58.144 desa yang memiliki tempat pembuangan sampah dalam lubang/dibakar (BPS-Podes, 2008). Demikian pula ketersediaan MCK dan air bersih yang masih belum memadai serta kecenderungan untuk lebih memanfaatkan sungai dan kondisi alam yang ada. Pada tahun 2008, terdapat 26.646 desa yang masyarakatnya tidak memiliki jamban (dari 67.245 desa secara keseluruhan). Di perdesaan, baru 8,9 persen rumah tangga yang memiliki akses pelayanan air ledeng dan kemas (BPS, 2007).
- f. Masih belum memadainya **kualitas dan kuantitas penataan ruang** kawasan perdesaan.

6. Rendahnya Tingkat Ketahanan Pangan

Rendahnya tingkat ketahanan pangan disebabkan oleh rendahnya tingkat penguasaan lahan oleh masyarakat perdesaan (rumah tangga petani) dan rendahnya kapasitas masyarakat (petani) dalam meningkatkan produktivitas pertanian. Penyusutan kepemilikan lahan oleh petani gurem (kepemilikan lahan kurang atau sama dengan 0,5 hektar) semakin meningkat. Di samping terbatasnya penguasaan lahan oleh petani, juga terjadi peningkatan alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan nonpertanian. Pada tahun 2008, alih fungsi terbesar lahan pertanian menjadi perumahan (20.756 desa) serta yang lainnya menjadi industri (969 desa), pertokoan (499 desa), perkantoran (801 desa) dan lainnya (1.691 desa) (BPS-Podes, 2008).

Di samping permasalahan alih fungsi lahan pertanian subur beririgasi ke non-pertanian, tekanan terhadap ketahanan pangan juga muncul dari kompetisi penggunaan lahan antara tanaman untuk pangan dan untuk energi. Seiring dengan meningkatnya kebutuhan energi alternatif nonfosil, kompetisi ini diprediksi akan meningkat.

7. Meningkatnya Degradasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Meningkatnya degradasi sumber daya alam dan lingkungan hidup disebabkan oleh pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan yang tidak berwawasan lingkungan. Selain itu, pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya

alam kurang memperhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan dan daya dukung wilayah sehingga menimbulkan berbagai permasalahan di wilayah perdesaan, seperti tingginya lahan-lahan kritis akibat penebangan hutan yang berlebihan, tingginya risiko kerentanan petani dan pelaku usaha di perdesaan akibat ketergantungan besar kepada sumber daya alam, dan penerapan pertanian intensif yang tidak berwawasan lingkungan. Pembangunan yang tidak berwawasan lingkungan dapat menyebabkan terjadinya bencana alam dan pencemaran lingkungan. Pada tahun 2008, bencana yang paling sering terjadi di perdesaan adalah banjir (15.143 desa atau 22,52 persen dari total jumlah desa), longsor (19 persen) dan paling sedikit adalah gempa bumi disertai tsunami (54 desa atau 0.08 persen dari jumlah desa). Pencemaran yang sering terjadi di perdesaan adalah pencemaran air (7.654 desa), udara (33 persen), suara (21 persen) dan paling sedikit terjadi adalah pencemaran tanah (1.110 desa) (BPS-Potensi Desa 2008).

Perubahan iklim, juga berimplikasi pada semakin rentannya usaha pertanian berhadapan dengan risiko bencana kekeringan, banjir, dan peningkatan suhu. Mengingat produktivitas sektor pertanian sangat dipengaruhi cuaca dan iklim, tantangan bagi pemerintah adalah meningkatkan akses informasi bagi petani tentang kondisi cuaca, kecenderungan iklim ekstrem seperti kemarau panjang dan hujan berlebihan. Diharapkan dengan tersedianya informasi tentang hal itu dapat membantu petani dan pemerintah menentukan langkah-langkah antisipasi.

8. **Belum Optimalnya Perlindungan Kepada Masyarakat, Masyarakat Hukum Adat, dan Tenaga Kerja Yang Bekerja Di Luar Negeri**

Peluang yang lebih besar bagi komunitas lokal untuk lebih eksis dalam mempertahankan hak dasarnya termasuk hak adat, belum diikuti dengan kewenangan regulasi di tingkat kabupaten dan kota dengan rambu-rambu yang jelas. Hal ini membawa akibat belum optimalnya perlindungan dan advokasi kepada masyarakat akan hak-haknya. Karena belum adanya UU yang secara khusus mengatur tentang masyarakat adat. Keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat seringkali melintasi batas-batas wilayah administratif kabupaten/kota, bahkan provinsi yang potensial menimbulkan konflik. Selain itu, pedoman substantif dan menyeluruh tentang masyarakat hukum adat sangat diperlukan agar tidak terjadi diskriminasi terhadap masyarakat adat hanya karena perbedaan penafsiran.

Masalah pun banyak teridentifikasi melalui banyaknya tenaga kerja Indonesia (terutama wanita) yang bekerja di sektor informal (*unskilled workers*) atau rumah tangga di luar negeri yang memerlukan upaya perlindungan dan advokasi yang memadai. Jumlah TKI bermasalah tahun 2007 adalah 12 persen, dan meningkat menjadi 13,3 persen pada tahun 2008. Pada tahun 2008, terdapat 396 kasus dengan 15 jenis kasus dilaporkan ke BNP2TKI. Kasus yang terjadi paling

banyak adalah putusnya komunikasi (108 kasus), gaji tidak dibayar (102 kasus), PHK sepihak (67 kasus), meninggal (46 kasus), penganiayaan (17 kasus) dan lainnya. Akibat dari munculnya kasus-kasus tersebut juga membuka peluang terjadinya tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

9.2.1.6 Ekonomi Lokal dan Daerah

Isu strategis utama dalam pengembangan ekonomi lokal dan daerah adalah lemahnya keterkaitan ekonomi antardaerah/wilayah, yaitu keterkaitan antara pusat-pusat produksi dengan pusat pengolahan dan pemasaran (termasuk jasa pendukung), yang digambarkan melalui perdagangan antardaerah yang relatif kecil sehingga perdagangan intradaerah menjadi dominan (hasil analisa data interregional input-output tahun 2005). Pulau Jawa masih terlalu dominan sebagai pusat kegiatan perekonomian, baik kegiatan produksi, distribusi, maupun jasa. Hal ini terlihat dari rata-rata lebih dari 17 persen output yang dihasilkan oleh wilayah-wilayah di luar Pulau Jawa digunakan oleh Pulau Jawa, sedangkan oleh wilayah lain di luar Pulau Jawa hanya di bawah 5 (lima) persen.

Lemahnya keterkaitan ekonomi antardaerah/wilayah juga ditunjukkan dengan adanya kesenjangan ekonomi antarkabupaten dan kota, yang digambarkan dari besarnya rata-rata PDRB kota yang hampir dua kali lebih besar dari rata-rata PDRB kabupaten. Kesenjangan tersebut terjadi lebih besar di Indonesia bagian barat, yaitu dengan rasio PDRB rata-rata kota terhadap kabupaten ialah 227 persen, sedangkan di Indonesia bagian timur hanya sebesar 171 persen. Hal ini menjelaskan bahwa di wilayah Indonesia Barat pertumbuhan ekonomi wilayah kota yang tinggi belum memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi di wilayah kabupaten sehingga terlihat adanya kesenjangan ekonomi yang besar antara wilayah kabupaten dengan wilayah kota di Indonesia bagian Barat bila dibandingkan dengan Indonesia bagian Timur.

Pengembangan ekonomi lokal dan daerah dibutuhkan untuk menjadi perekat keterkaitan antara kota-desa di dalam kabupaten dan propinsi, serta antara pusat-pusat pertumbuhan lokal dengan daerah belakangnya (*hinterlandnya*). Adapun masalah mendasar dalam pengembangan ekonomi lokal dan daerah adalah sebagai berikut.

1. Rendahnya kapasitas tata kelola ekonomi daerah

- a. **Dukungan peraturan dan perundangan yang berpihak dan tidak saling tumpang tindih yang dikeluarkan oleh pemerintah, baik di pusat maupun di daerah, dalam upaya pengembangan ekonomi daerah masih kurang.** Menurut Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) pada tahun 2008, daya tarik investasi daerah dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain: faktor kepastian hukum sebesar 39 persen, faktor Peraturan Daerah sebesar 25 persen, faktor aparaturnya sebesar 22 persen, serta faktor keuangan daerah sebesar 14 persen. Regulasi

pemerintah, baik pusat maupun daerah, yang saling tumpang tindih dan bermasalah menimbulkan ketidakpastian hukum dan biaya ekonomi yang tinggi.

- b. **Peran dan fungsi kelembagaan pengelolaan ekonomi daerah, terutama di bidang permodalan dan perizinan usaha masih lemah.** Kelembagaan usaha ekonomi daerah masih terkonsentrasi di wilayah Pulau Jawa dan Bali. Pada tahun 2008 nilai kredit usaha kecil rupiah yang tertinggi berada di Pulau Jawa-Bali, yaitu sebesar 61,11 persen atau sebesar 63,638 miliar rupiah, sedangkan nilai kredit usaha kecil di Pulau Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua relatif kecil, yaitu masih di bawah 3 persen dari total nasional.
 - c. **Akses pada data dan informasi potensi investasi daerah, serta penelitian pengembangan ekonomi daerah masih terbatas.** Kurangnya dukungan data dan informasi menghambat pengetahuan pelaku ekonomi dalam hal produksi, pasar, teknologi, dalam upaya pengembangan ekonomi lokal dan daerah.
 - d. **Efektivitas dan efisiensi pengelolaan ekonomi daerah masih kurang, disebabkan oleh belum optimalnya sistem monitoring dan evaluasi tata kelola ekonomi daerah.** Data menunjukkan bahwa provinsi dengan Indeks Kinerja Ekonomi Daerah pada tahun 2008 yang terbaik adalah Kepulauan Riau, NAD, DKI Jakarta, dan Riau.
2. **Rendahnya kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan ekonomi daerah secara lintas sektor dan lintas wilayah**
- a. **Kapasitas SDM aparatur daerah dalam mengelola ekonomi daerah secara lintas sektor masih rendah.** Perhatian SDM aparatur daerah dalam mengelola ekonomi daerah digambarkan, antara lain melalui pengalokasian anggaran belanja/ pengeluaran pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten) untuk kegiatan investasi dan non-investasi, yang di tingkat provinsi, rata-rata pemerintah daerah Provinsi hanya mengalokasikan anggaran untuk belanja kegiatan investasi (belanja modal) sebesar 28 persen dari total belanja daerah, sisanya lebih banyak digunakan untuk kegiatan non-investasi, terutama belanja pegawai (BPS, 2007). Provinsi yang memiliki Indeks Komitmen Pemerintah Provinsi pada tahun 2008 terbaik secara nasional berturut-turut adalah Sulawesi Utara, Kalimantan Barat, Jawa Tengah, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah.
 - b. **Kompetensi SDM stakeholder lokal/ daerah (masyarakat dan pengusaha lokal/daerah) masih rendah.** Pembangunan ekonomi lokal dan daerah kurang didukung oleh kompetensi sumber daya manusia yang memadai. Ditinjau dari jumlah pekerja yang terkait dengan bidang pengembangan ekonomi lokal dan daerah dengan tingkat pendidikan tinggi secara absolut jumlahnya masih relatif kecil atau belum sesuai dengan

kompetensinya (Februari, 2009). Jumlah pekerja dengan pendidikan Diploma I/II/III hanya sebesar 2,68 juta orang (2,56 persen) dan pekerja dengan pendidikan sarjana hanya sebesar 4,22 juta orang (4,04 persen). Provinsi yang memiliki Indeks Tenaga Kerja pada tahun 2008 terbaik adalah DKI Jakarta, Kalimantan Timur, Papua Barat, Papua, dan Kepulauan Riau.

- c. **Partisipasi stakeholder lokal/daerah dalam pengambilan keputusan terkait pengembangan ekonomi daerah masih rendah.** Hal ini terlihat pada kurang dilibatkannya stakeholder lokal/ daerah, yaitu pemerintah daerah dan dunia usaha, khususnya pada dalam proses perencanaan dan penganggaran program/kegiatan pengembangan ekonomi lokal dan daerah sehingga program/kegiatan yang disusun cenderung kurang memperhatikan aspirasi lokal.
3. **Rendahnya kapasitas lembaga dan fasilitasi dalam mendukung percepatan pengembangan ekonomi lokal dan daerah**
 - a. **Fungsi lembaga-lembaga fasilitasi ekonomi daerah, baik di tingkat pusat maupun di daerah, baik dari segi kapasitas, jumlah maupun jangka waktunya kurang optimal.** Hal ini terkait dengan terbatasnya fasilitasi yang diberikan, baik oleh pemerintah maupun nonpemerintah, dan kurang terintegrasinya fasilitasi yang diberikan kepada daerah dalam upaya pengembangan ekonomi lokal dan daerah.
 - b. **Kapasitas tenaga fasilitator pengembangan ekonomi lokal dan daerah masih terbatas, baik yang disediakan oleh pemerintah maupun oleh nonpemerintah.** Beberapa program yang bersifat pemberdayaan masyarakat dan berorientasi kepada pengembangan ekonomi lokal dan daerah menyediakan tenaga fasilitator yang memiliki kemampuan/kompetensi yang terbatas di satu bidang saja, sedangkan kegiatan fasilitasi yang dibutuhkan bersifat menyeluruh, tidak terbatas di satu bidang saja. Dalam rangka pengembangan rantai nilai komoditas yang berorientasi pasar, pelaku usaha ekonomi lokal dan daerah membutuhkan pendampingan dari mulai tahap produksi, pengolahan, sampai dengan pemasaran.
 4. **Kurangnya kerjasama antardaerah dan kemitraan pemerintah-swasta dalam upaya pengembangan ekonomi lokal dan daerah**
 - a. **Hubungan kerjasama antardaerah belum optimal,** lintas provinsi dan lintas kabupaten/kota), baik dalam satu bagian pulau maupun lintas pulau dapat dilihat dari banyaknya perjanjian kerjasama antardaerah yang sudah ditandatangani, namun tidak diimplementasikan. Ini disebabkan antara lain: 1) kurangnya dukungan legalitas dan peraturan teknis yang lengkap dalam implementasi kerjasama antardaerah yang menimbulkan keraguan dari

pihak Pemerintah Daerah, baik dalam hal aspek pendanaan, kelembagaan, manajemen maupun sumber daya manusia; 2) kurangnya dukungan seluruh pemangku kepentingan dalam pembentukan dan pelaksanaan kerjasama antardaerah akibat kurangnya sosialisasi kerjasama antardaerah; 3) belum adanya lembaga mediator kerjasama antardaerah. Di lain pihak, semangat otonomi daerah yang masih dipandang sempit dan kedaerahan menimbulkan ego daerah yang turut menghambat terbentuknya hubungan kerjasama antardaerah.

- b. **Kemitraan antara Pemerintah-Swasta dalam pengembangan ekonomi daerah rendah.** Rendahnya kemitraan antara swasta dengan pemerintah daerah disebabkan oleh kurang kondusifnya iklim investasi di daerah dan kurangnya kesadaran pemerintah daerah untuk melibatkan swasta dalam pengembangan ekonomi daerah. Provinsi dengan Indeks Peranan Dunia Usaha dalam Perekonomian Daerah pada tahun 2008 yang terbaik adalah DKI Jakarta, Jawa Timur, Riau, Jawa Tengah dan Kalimantan Timur.

5. **Kurang meratanya pembangunan sarana dan prasarana pendukung kegiatan ekonomi lokal dan daerah**

Kurang bertumbuhnya pengembangan ekonomi lokal dan daerah terutama disebabkan oleh kurang meratanya pembangunan jaringan sarana prasarana pendukung kegiatan ekonomi lokal dan daerah, terutama transportasi, energi, informasi dan telekomunikasi, serta air baku. Data menunjukkan bahwa secara nasional provinsi-provinsi di P. Jawa dan Bali, yaitu DKI Jakarta, Bali, Jawa Tengah, Jawa Timur, memiliki Indeks Infrastruktur yang terbaik pada tahun 2008, sedangkan provinsi-provinsi di luar P.Jawa memiliki Indeks Infrastruktur terburuk.

9.2.1.7 Kawasan Strategis

Untuk pengembangan kawasan strategis diperlukan penelaahan yang lebih mendalam terhadap format kebijakan yang dapat mewujudkan keterkaitan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi yang selama ini telah dikembangkan melalui KPBPB dan KAPET yang sudah ada dengan pengembangan KEK yang baru. Pengembangan KEK harus mempertimbangkan karakteristik sosial-budaya-ekonomi Indonesia, yang sangat erat kaitannya dengan regulasi insentif fiskal dan nonfiskal yang akan diberlakukan oleh pemerintah bagi KEK tersebut.

Berdasarkan kondisi umum, kawasan strategis selama kurun waktu RPJMN 2004—2009, masih memerlukan penelaahan yang lebih mendalam terhadap format kebijakan yang dapat mewujudkan keterkaitan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi yang selama ini telah dikembangkan melalui KPBPB dan KAPET yang sudah ada dengan pengembangan KEK yang baru.

Berkenaan dengan pengembangan KEK dan optimalisasi pengelolaan KPBPB dan KAPET, dapat diidentifikasi permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan kawasan strategis adalah:

1. masih belum kondusifnya pelayanan investasi di daerah dalam mendukung KAPET yang menyebabkan belum mampu menarik investor;
2. masih kurang profesionalnya manajemen kelembagaan pengembangan kawasan dan perusahaan kawasan;
3. masih rendahnya pengalokasian anggaran yang diarahkan untuk pembangunan KAPET;
4. masih belum berkembangnya keterpaduan program antarsektor, antarwilayah kabupaten/kota, antarprovinsi, serta antarpelaku usaha baik domestik maupun internasional;
5. masih terbatasnya kondisi dan ketersediaan prasarana dan sarana perhubungan dan energi dalam mendukung pengembangan produk-produk unggulan terutama di lokasi sentra produksi dan lokasi industri pengolahannya;
6. masih kurangnya dukungan peraturan perundangan turunan UU KPBPB yang mengatur operasionalisasi, seperti masalah pembagian kewenangan perijinan investasi antara pusat dan daerah yang belum jelas di KPBPB Sabang, Batam, Bintan, dan Karimun;
7. masih belum optimalnya kelembagaan pengelola kawasan strategis nasional yang belum didukung dan sejalan dengan kebijakan otonomi daerah, seperti adanya kesan dualisme pemilik kewenangan di dalam satu wilayah;
8. masih belum terbangunnya secara optimal kerjasama antara industri dan perdagangan di kawasan dengan jaringan perdagangan dunia internasional;
9. masih kurangnya efektifitas koordinasi pelaksanaan program/kegiatan antara instansi sektoral di pusat dengan di daerah dan antara pelaku usaha domestik dengan pelaku usaha internasional;
10. masih belum berkembangnya kualitas dan dukungan sistem pelayanan jasa perdagangan dan kepelabuhanan baik laut maupun udara;
11. masih belum selesainya peraturan perundang undangan turunan UU KEK; dan
12. masih diperlukan penelaahan mendalam terhadap format kebijakan yang dapat mewujudkan keterkaitan pengembangan KEK dengan KAPET dan KPBPB yang perlu mempertimbangkan karakteristik geografi, sosial, dan budaya lokal.



9.2.1.8 Kawasan Perbatasan

Permasalahan pengembangan kawasan perbatasan yang akan dihadapi dapat dilihat dari beberapa aspek sebagai berikut.

1. Pertahanan, Keamanan, dan Penegakan Hukum

- a. Belum disepakatinya beberapa segmen batas negara di darat dan di laut. Di wilayah perbatasan laut, segmen batas negara masih memerlukan kesepakatan di antaranya adalah:
 - (a) *Zona Ekonomi Eksklusif* antara RI-India, RI-Vietnam, RI-Filipina, RI-Thailand, RI-Palau, RI-Timor Leste, RI-Australia;
 - (b) *Batas Laut Teritorial* antara RI-Malaysia di Laut Sulawesi dan RI-Timor Leste, *Three junction point* RI-Singapura-Malaysia; serta
 - (c) *Batas Landas Kontinen* RI-Filipina, RI-Palau, RI-Timor Leste, dan RI-Australia.

Di samping itu, perlu diperhatikan pula pulau-pulau kecil terdepan (terluar) di sekitar perbatasan laut sebagai lokasi penempatan titik dasar/titik referensi sebagai acuan dalam menarik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia.

Sementara itu, di wilayah perbatasan darat, masih terdapat 9 (sembilan) masalah perbatasan darat (*outstanding boundary problems*) pada titik-titik atau segmen tertentu, di antaranya RI-Malaysia, yakni: (a) garis batas negara antara Kalimantan Barat-Serawak (Segmen Gunung Raya, Batu Aum, Sungai Buan, dan Segmen D.400); (b) garis batas negara Kalimantan Timur dan Sabah (Sungai Sinapad, Sungai Semantil, Pulau Sebatik, Segmen daerah prioritas 2700 dan segmen daerah prioritas C.500); dan (c) belum disepakatinya beberapa segmen batas darat RI-Timor Leste. Permasalahan batas negara di wilayah perbatasan darat juga diwarnai oleh kerusakan atau pergeseran sebagian patok atau pilar batas, sehingga demarkasi batas di lapangan menjadi kabur; dan (d) belum terselesaikannya batas negara yang dapat menimbulkan potensi konflik teritorial dengan negara tetangga sehingga mengancam kedaulatan wilayah dan mengakibatkan kerancuan dalam pemanfaatan sumberdaya alam.

- b. Masih sering terjadi praktek pelanggaran hukum di kawasan perbatasan akibat penegakan hukum yang masih lemah. Pelanggaran itu berupa pencurian kayu, penyelundupan barang, pencurian ikan, dan penjualan manusia (*human trafficking*) yang dihadapkan pada masalah luasnya wilayah perbatasan yang harus diawasi, dimana belum sebanding dengan ketersediaan sarana dan prasarana pengamanan dan pengawasan yang ada.

2. Perekonomian Wilayah

- a. Belum berkembang kota-kota utama kawasan perbatasan sebagai pusat kegiatan ekonomi kawasan perbatasan. Peraturan Pemerintah No 26 tahun 2008 telah menetapkan 26 kota perbatasan sebagai Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN). Namun, hingga saat ini, sebagian besar PKSN belum berkembang sebagai motor penggerak perekonomian dan pusat pelayanan kegiatan kawasan perbatasan.
- b. Belum optimal pelaksanaan kerjasama ekonomi antarnegara. Forum kerjasama antarnegara yang melibatkan baik pemerintah daerah, masyarakat, maupun dunia usaha belum sepenuhnya dioptimalkan untuk mengembangkan kegiatan perekonomian di kawasan perbatasan. Kondisi geografis yang berdekatan dengan negara tetangga memberikan peluang yang besar bagi terlaksananya suatu kerjasama yang saling menguntungkan, misalnya melalui pelaksanaan Kerjasama Ekonomi Sub-Regional (KESR) seperti *Brunei-Indonesia-Malaysia-Phillipines East ASEAN Growth Area (BIMP-EAGA)*, *Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle (IMT-GT)*, dan *Australia-Indonesia Development Area (AIDA)*, serta kerjasama perbatasan seperti Forum Sosial Ekonomi Malaysia-Indonesia (SOSEK MALINDO).

3. Kesejahteraan Masyarakat

- a. Tingginya keluarga miskin di kawasan perbatasan, adalah implikasi dari rendahnya kualitas sumberdaya manusia, minimnya infrastruktur sosial ekonomi, rendahnya produktivitas masyarakat dan belum optimalnya pemanfaatan sumberdaya alam.
- b. Perbedaan tingkat kesejahteraan dengan negara tetangga, khususnya di kawasan yang kondisi kesejahteraan masyarakatnya lebih rendah dibandingkan masyarakat di negara tetangga.

4. Sarana dan Prasarana

- a. Jumlah Pos Lintas Batas (PLB) masih sangat terbatas. Saat ini hanya tersedia 79 PLB tradisional dan internasional sebagai pintu gerbang yang mengatur arus keluar masuk orang dan barang di kawasan perbatasan. PLB yang ada saat ini sebagian besar belum dilengkapi oleh fasilitas kepabeanan, keimigrasian, karantina, dan keamanan. PLB yang telah dilengkapi pada umumnya belum didukung oleh dengan prasarana dan sarana penunjang yang mencukupi, seperti jalan, listrik, air bersih, dan perumahan bagi aparat.
- b. Aksesibilitas perhubungan yang belum memadai, menyebabkan keterisolasian wilayah. Pada sebagian besar kawasan perbatasan masih sulit dijumpai akses transportasi darat ke kota-kota tertentu yang mempunyai

fungsi untuk pelayanan pemerintahan dan pelayanan ekonomi. Hal ini menimbulkan kecenderungan masyarakat setempat untuk berorientasi kepada pelayanan sosial ekonomi di wilayah negara tetangga yang lebih mudah diakses.

- c. Sarana komunikasi dan informasi masih terbatas, misalnya pemancar radio dan televisi serta jaringan telepon kabel. Akibatnya, masyarakat di kawasan perbatasan lebih banyak memanfaatkan fasilitas komunikasi dan informasi dari negara tetangga sehingga informasi dan wawasan tentang perkembangan nasional menjadi kurang diketahui oleh masyarakat di perbatasan.
- d. Sarana dan prasarana pelayanan sosial dasar yang masih sangat terbatas. Kondisi ini disebabkan oleh sedikitnya jumlah penduduk dan belum meratanya penyebaran penduduk yang tinggal di perbatasan. Akibatnya, tidak sedikit warga perbatasan yang cenderung memanfaatkan kedekatan geografis dan kekerabatan etnis untuk mendapatkan pelayanan dasar sosial, seperti pendidikan dan kesehatan, dari negara tetangga.

5. Kelembagaan

- a. Belum ada lembaga yang menangani pengelolaan batas wilayah dan kawasan perbatasan secara terkoordinasi dan terintegrasi. Saat ini pengelolaan batas wilayah negara masih ditangani oleh forum-forum yang bersifat *ad hoc*, sedangkan pengembangan kawasan perbatasan masih cenderung bersifat sektoral, parsial dan tidak terpadu.
- b. Belum terpadu pengembangan kawasan perbatasan dan belum tercipta kolaborasi yang efektif antarsektor, baik antara pemerintah pusat dan daerah, maupun antarpemerintah daerah dalam pengembangan kawasan perbatasan sehingga sering menyebabkan terjadinya inefisiensi dan inefektifitas kegiatan pembangunan di kawasan perbatasan.

6. Pengelolaan Sumberdaya Alam

- a. Pemanfaatan sumberdaya alam di kawasan perbatasan tidak terkendali sehingga mengganggu keseimbangan lingkungan, misalnya penebangan kayu ilegal di kawasan hutan lindung secara liar dan besar-besaran di Kalimantan dan Papua. Selain itu, juga masih terjadi penambangan pasir laut di pesisir dan pulau-pulau kecil di Kepulauan Riau yang mengakibatkan kerusakan lingkungan.
- b. Pemanfaatan sumber daya alam tidak berkelanjutan. Semua potensi sumberdaya alam di kawasan perbatasan, baik yang di laut atau di darat, secara umum masih belum dilakukan untuk sekedar memenuhi kebutuhan mendesak saat ini. Apabila dikelola dengan baik dengan prinsip berkelanjutan, pemanfaatan sumberdaya alam seperti kehutanan,

pertambangan, perkebunan, perikanan, dan pariwisata dapat berpotensi mendatangkan devisa yang besar.

9.2.1.9 Daerah Tertinggal

Permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam pembangunan di daerah tertinggal adalah sebagai berikut:

1. **Pengelolaan potensi sumber daya lokal dalam pengembangan perekonomian daerah tertinggal masih belum optimal.** Hal ini disebabkan oleh: (1) rendahnya kemampuan permodalan, penguasaan teknologi, informasi pasar dan investasi dalam pengembangan produk unggulan daerah, dan (2) rendahnya kapasitas kelembagaan pemerintah daerah dan masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya lokal;
2. **Kualitas sumber daya manusia dan tingkat kesejahteraan masyarakat daerah tertinggal masih rendah.** Hal ini tercermin dari rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan angkatan kerja, rendahnya derajat kesehatan masyarakat, dan tingginya tingkat kemiskinan;
3. **Koordinasi antarpelaku pembangunan di daerah tertinggal masih lemah,** karena belum dimanfaatkannya kerjasama antardaerah tertinggal pada aspek perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan pembangunan;
4. **Tindakan afirmatif kepada daerah tertinggal belum optimal,** khususnya pada aspek kebijakan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, koordinasi, dan pengendalian pembangunan;
5. **Aksesibilitas daerah tertinggal terhadap pusat-pusat pertumbuhan wilayah masih rendah,** khususnya terhadap sentra-sentra produksi dan pemasaran karena belum didukung oleh sarana dan prasarana angkutan barang dan penumpang yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik daerah tertinggal;
6. **Sarana dan prasarana pendukung ekonomi lainnya masih terbatas,** yang meliputi energi listrik, telekomunikasi, irigasi dan air bersih.

9.2.1.10 Kawasan Rawan Bencana

Permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam pembangunan di kawasan rawan bencana adalah sebagai berikut:

1. **Kinerja penanggulangan bencana belum memadai,** terutama terkait dengan keterbatasan kapasitas dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Dalam penyelenggaraan kegiatan tanggap darurat, masalah yang dihadapi di antaranya adalah: (1) belum terbentuknya kelembagaan penanggulangan bencana di daerah; dan (2) masih tingginya ketergantungan pendanaan bantuan tanggap darurat dan bantuan kemanusiaan pada pemerintah pusat. Sementara itu,

masalah yang dihadapi dalam upaya rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah yang terkena dampak bencana di antaranya adalah: (1) basis data statistik wilayah yang tidak termutakhirkan dan teradministrasikan secara reguler; (2) penilaian kerusakan dan kerugian pascabencana yang tidak akurat; (3) keterbatasan peta wilayah pascabencana yang menyebabkan terhambatnya pelaksanaan analisa kerusakan dan kerugian; (4) koordinasi penilaian kerusakan dan kerugian serta perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi yang terpusat; serta (5) keterbatasan alokasi pendanaan bagi rehabilitasi dan rekonstruksi yang bersumber dari pemerintah daerah.

2. **Kesadaran terhadap risiko bencana dan pemahaman terhadap kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana masih rendah**, di antaranya meliputi rendahnya kesadaran terhadap upaya pengurangan risiko bencana, serta masih rendahnya kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana. Secara rinci masalah yang dihadapi terkait dengan kesadaran terhadap upaya pengurangan risiko bencana di antaranya adalah: (a) keterbatasan jaringan informasi dan komunikasi yang efektif dalam penyebaran informasi kebencanaan kepada masyarakat; (b) belum terintegrasinya pengurangan risiko bencana dalam perencanaan pembangunan secara efektif dan komperhensif termasuk dalam perencanaan tata ruang wilayah; dan (c) belum optimalnya penjabaran kebijakan kebijakan pengurangan risiko bencana kedalam kebijakan daerah. Dalam hal kesiapsiagaan menghadapi bencana, masalah yang muncul utamanya terkait dengan: (1) masih terbatasnya kebijakan penanggulangan bencana di daerah; (2) masih terbatasnya kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana di daerah; dan (3) keterbatasan alokasi pendanaan bagi penanggulangan bencana yang bersumber dari dana daerah.

9.2.1.11 Desentralisasi, Hubungan Pusat Daerah, dan Antardaerah

Untuk dapat mewujudkan seluruh elemen pembangunan wilayah dan tata ruang, dibutuhkan kebijakan desentralisasi yang tepat, sesuai dengan kebutuhan dan mendorong harmonisasi kebijakan antara Pemerintah dan pemerintahan daerah, serta terbentuk proses pembangunan yang lebih efisien dan efektif. Beberapa permasalahan yang terkait dengan desentralisasi, serta hubungan pusat daerah dan antardaerah dapat dirinci sebagai berikut.

1. Pemantapan pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah, pemerintahan daerah provinsi, dan pemerintahan daerah kabupaten/kota. Pengaturan dan pelaksanaan pembagian urusan pemerintahan masih perlu dimantapkan untuk menghindari tumpang tindih kewenangan antartingkat pemerintahan. Selain itu, semua pengaturan yang lebih aplikatif dan teknis seperti dalam bentuk Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) untuk masing-masing urusan masih dalam proses penyelesaian.

2. Masih ada daerah yang belum memanfaatkan peluang kerja sama daerah di berbagai bidang (ekonomi dan keuangan, pelayanan publik, pengelolaan sumber daya alam).
3. Pelaksanaan PP No. 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah masih perlu ditingkatkan efektivitasnya.
4. Sistem pengawasan dan evaluasi kinerja pemerintahan daerah masih perlu ditingkatkan agar penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat berjalan dengan lebih baik. Kebutuhan akan sistem pengawasan dan evaluasi kinerja pemerintahan daerah yang andal makin diperlukan terlebih saat dana yang ditransfer ke daerah makin membesar serta makin banyaknya daerah otonom baru di wilayah yang jauh dan terpencil dari kedudukan pemerintah provinsi dan Pemerintah. Selain itu, jumlah daerah yang memiliki Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) masih relatif rendah dan perlu ditingkatkan.

9.2.1.12 Tata Kelola dan Kapasitas Pemerintahan Daerah

Untuk melaksanakan tata pemerintahan yang baik diperlukan kapasitas pemerintahan daerah yang berkualitas. Sehubungan dengan itu, beberapa permasalahan yang terkait dengan tata kelola dan kapasitas pemerintahan daerah adalah sebagai berikut.

1. Kelembagaan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pelayanan publik berdasarkan suatu standar tertentu di seluruh wilayah masih perlu lebih dimantapkan.
2. Kompetensi atau kualitas dan pengelolaan atau pendayagunaan aparatur pemerintah daerah untuk melaksanakan pelayanan publik berdasarkan SPM masih perlu ditingkatkan. Sistem pengelolaan PNS daerah tersebut meliputi sistem rekrutmen, pendidikan, penempatan, promosi, dan mutasi PNS.
3. Dalam bidang keuangan pemerintah daerah terdapat permasalahan, antara lain: (a) belum optimalnya penggunaan dana perimbangan daerah, (b) belum optimalnya pendapatan pajak dan retribusi daerah yang tepat dan proporsional sehingga dapat menjadi sumber utama penerimaan daerah sekaligus tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi di daerah, (c) belum optimalnya pemanfaatan dan pengelolaan sumber-sumber alternatif penerimaan daerah seperti pinjaman daerah, aset daerah, BLUD, BUMD, dan (d) masih perlu ditingkatkannya profesionalisme dalam pengelolaan keuangan daerah.

9.2.2 Sasaran

Berdasarkan penjabaran permasalahan-permasalahan tersebut di atas, sasaran-sasaran pokok pembangunan bidang Wilayah dan Tata Ruang adalah sebagai berikut.

9.2.2.1 Data dan Informasi Spasial

4. **Koordinasi kegiatan survei dan pemetaan nasional adalah**
 - a. terbentuknya lembaga survei pemetaan yang memadai di semua instansi pemerintah terkait dan swasta;
 - b. terkoordinasinya kegiatan survei dan pemetaan nasional dalam satu *platform* nasional;
 - c. tersusunnya peraturan perundangan, standar, prosedur, dan manual teknis bagi kegiatan survei dan pemetaan nasional, termasuk peraturan terkait dengan pengadaan.
5. **Kuantitas dan kualitas data dan informasi spasial adalah**
 - a. tercakupnya seluruh wilayah nasional dalam kegiatan survei dan pemetaan;
 - b. tervalidasinya data digital yang ada;
 - c. tersedianya data dan informasi spasial dalam format digital;
 - d. terbarukannya data dasar dan tematik.
6. **Akses data dan informasi adalah**
 - a. terbangunnya infrastruktur jaringan data spasial nasional;
 - b. terbentuknya organisasi pendukung jaringan data spasial nasional;
 - c. tersedianya protokol dan aplikasi akses data spasial.
7. **Sumber Daya Manusia di bidang survei dan pemetaan belum mencukupi. Untuk itu perlu**
 - a. dikembangkannya lembaga pelatihan survei dan pemetaan nasional;
 - b. tersusunnya kurikulum dan silabus nasional bagi pelatihan survei dan pemetaan;
 - c. terbangunnya sistem sertifikasi nasional bagi tenaga survei dan pemetaan;
 - d. tersusunnya strategi pengembangan dan pengelolaan sumberdaya manusia di bidang survei dan pemetaan.

9.2.2.2 Penataan Ruang

1. **Terpenuhinya peraturan perundang-undangan untuk mendukung implementasi UU No. 26 Tahun 2007**, yaitu disahkannya 2 Undang-Undang, 5 Peraturan Pemerintah, 7 Peraturan Presiden tentang RTR Pulau, dan instrumen pengendalian, insentif dan disinsentif.
2. **Terlaksananya pembinaan penataan ruang kepada pemangku kepentingan**, yaitu pemerintah pusat, pemerintah daerah di bidang tata ruang dan LSM untuk membuat para pemangku kepentingan pembangunan lebih memahami aturan-aturan yang terkait dengan penataan ruang dalam melakukan pemanfaatan ruang. Indikator untuk sasaran ini dapat diukur dari menurunnya jumlah pelanggaran penyelenggaraan penataan ruang hingga tahun 2014.
3. **Terwujudnya peningkatan peran kelembagaan yang andal mencakup SDM dan sistem informasi** dalam kegiatan penataan ruang, yaitu dengan mengoptimalkan kapasitas Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) di Provinsi dan diharapkan dalam 5 tahun ke depan seluruh kabupaten dan kota di Indonesia telah memiliki BKPRD.
4. **Terwujudnya peningkatan kualitas produk Rencana Tata Ruang yang disertai dengan peningkatan layanan peta dasar dan tematik**, dengan antara lain tersedianya peta dasar skala 1:25.000 untuk Pulau Jawa dan atau 1:50.000 untuk Luar Pulau Jawa, dan peta skala 1:10.000 untuk kawasan metropolitan.
5. **Terwujudnya sinkronisasi program pembangunan antarsektor dan antarwilayah yang mengacu kepada RTRW** menjadi sasaran yang ingin dicapai dalam kegiatan koordinasi baik lintas sektor maupun wilayah. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa pembangunan atau pemanfaatan ruang suatu wilayah telah sesuai dengan indikasi program yang tercantum dalam RTRWN.
6. **Terwujudnya kesepakatan kerjasama pembangunan antarwilayah**, yaitu antarwilayah perbatasan, antara negara, dan antarkawasan metropolitan yang terwujud dalam pembentukan badan kerjasama sehingga diharapkan terjadi peningkatan koordinasi dan keterpaduan pelaksanaan pemanfaatan ruang lintas wilayah.
7. **Terlaksananya pengendalian pemanfaatan ruang dan pengawasan teknis** sebagai suatu sasaran dalam kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang membuat kegiatan penyelenggaraan penataan ruang sesuai dengan yang direncanakan. Selain itu, dampaknya adalah kepercayaan masyarakat meningkat terhadap penegakan aturan penataan ruang karena adanya pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan. Salah satu instrumen pengawasan teknis adalah dengan dibentuknya Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Penataan Ruang.

9.2.2.3*Pertanahan*

1. Bertambahnya cakupan wilayah yang memiliki peta pertanahan seluas 10.500.000 ha.
2. Bertambahnya luas tanah yang telah terdaftar.
3. Meningkatnya kepastian hukum hak atas tanah, termasuk di dalamnya bagi masyarakat kurang mampu, untuk mengakses sumberdaya produktif.
4. Meningkatnya penerapan sistem informasi dan manajemen pertanahan.
5. Meningkatnya ketersediaan informasi mengenai kesesuaian pola tata guna tanah dengan RTRW.
6. Terlaksananya pemberian aset tanah yang layak terutama bagi kalangan kurang mampu sebanyak 1.050.000 bidang.
7. Meningkatnya pengendalian penguasaan tanah terlantar.
8. Terlaksananya penataan dan penegakan hukum pertanahan.
9. Meningkatnya kualitas SDM dalam pengelolaan pertanahan.

9.2.2.4*Perkotaan*

1. Terlaksananya penyiapan kebijakan pembangunan perkotaan dan sinkronisasi peraturan perundangan terkait pembangunan perkotaan.
2. Terbangunnya kelembagaan dan kerjasama antarkota dalam pengembangan sistem informasi dan database, badan kerjasama, pembangunan infrastruktur terpadu, serta pengembangan ekonomi.
3. Tersedianya pelayanan publik di perkotaan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Perkotaan.
4. Meningkatnya daya saing perkotaan.
5. Meningkatkan kualitas kehidupan di perkotaan.

9.2.2.5*Perdesaan*

1. Menguatnya kapasitas dan peran pemerintahan desa, serta kelembagaan masyarakat, dengan menerapkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik termasuk meningkatnya kapasitas (teknis dan fiskal) pemerintah kabupaten dalam pembangunan perdesaan.
2. Meningkatnya keberdayaan masyarakat perdesaan dan perlindungan masyarakat adat, termasuk meningkatnya taraf pendidikan, dan status kesehatan.

3. Meningkatnya pengembangan ekonomi perdesaan, melalui penciptaan kemudahan/akses berusaha, kesempatan kerja, dan peningkatan kemampuan masyarakat perdesaan terhadap permodalan, lahan, pengembangan agribisnis berbasis komoditas unggulan (termasuk di dalamnya agrowisata, dan agroindustri), pengembangan kewirausahaan, pengelolaan pasar desa serta penguatan kelembagaan keuangan mikro dan BUMDes/Kel.
4. Meningkatnya sarana prasarana perdesaan yang mendukung percepatan pembangunan perdesaan.
5. Meningkatnya pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang seimbang, berkelanjutan, berwawasan mitigasi bencana termasuk meningkatnya ketahanan pangan masyarakat perdesaan.

9.2.2.6 Ekonomi Lokal dan Daerah

Dalam upaya meningkatkan pengembangan ekonomi lokal dan daerah, khususnya keterkaitan ekonomi antara pusat-pusat pertumbuhan lokal dengan wilayah belakangnya (*hinterland*) dan antara desa dengan kota, sasaran-sasaran pokok pembangunan bidang Pengembangan Ekonomi Lokal dan Daerah dalam 5 tahun kedepan adalah sebagai berikut.

1. **Meningkatnya keterkaitan kegiatan ekonomi antara pusat pertumbuhan dengan wilayah/kawasan produksi** melalui berfungsinya kawasan yang berpotensi untuk menjadi pusat pertumbuhan lokal dan wilayah yang baru berdasarkan rencana tata ruang dan masterplan kawasan/wilayah.
2. **Meningkatnya daya saing daerah dalam mendukung pengembangan ekonomi daerah diupayakan** melalui:
 - a. pelaksanaan *good governance* dalam efektivitas dan efisiensi pengelolaan ekonomi daerah.
 - b. jaminan kepastian berusaha melalui penyederhanaan izin berusaha, penerapan pelayanan terpadu satu pintu;
 - c. kemampuan para pemangku kepentingan dalam pengembangan ekonomi lokal dan daerah,
 - d. aksesibilitas terhadap sarana dan prasarana kawasan pusat-pusat pertumbuhan wilayah (kawasan perkotaan baru, Agropolitan, Minapolitan, kawasan sentra produksi, klaster industri, dan sebagainya);
3. **Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan perdagangan antar daerah dapat dicapai**, melalui peningkatan investasi, penyerapan tenaga kerja, dan kerja sama antardaerah.

9.2.2.7 Kawasan Strategis

Dalam upaya mengondisikan kawasan strategis diperlukan:

1. terwujudnya KAPET sebagai pusat pertumbuhan dan penggerak laju pertumbuhan ekonomi di daerah yang kesenjangannya masih tinggi untuk mengurangi ketimpangan pembangunan antara daerah yang relatif maju dengan daerah yang tertinggal;
2. terwujudnya KPBPB sebagai pusat jasa pelabuhan dan pusat perdagangan internasional;
3. terwujudnya KEK sebagai pendorong pelipatgandaan laju pertumbuhan ekonomi di beberapa kawasan strategis, dengan orientasi distribusi dan perdagangan internasional, yang ditujukan untuk dapat menjadi pintu gerbang distribusi barang dan jasa internasional dalam rangka merespons pelaksanaan perdagangan bebas di tingkat regional dan internasional; dan
4. terwujudnya percepatan pembangunan di kawasan strategis dan percepatan pertumbuhan lainnya yang mampu menjadi penggerak bagi daerah tertinggal di sekitarnya, termasuk kawasan perbatasan, dalam suatu “sistem wilayah pengembangan ekonomi’ yang terintegrasi dan sinergis.

9.2.2.8 Kawasan Perbatasan

Kawasan perbatasan menuntut upaya untuk:

1. terwujudnya kedaulatan wilayah nasional yang ditandai dengan kejelasan dan ketegasan batas-batas wilayah negara;
2. menurunnya kegiatan ilegal dan terpeliharanya lingkungan hidup di kawasan perbatasan;
3. meningkatnya kesejahteraan masyarakat yang ditandai dengan menurunnya jumlah penduduk miskin di kecamatan perbatasan dan pulau kecil terluar;
4. berfungsinya Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) sebagai pusat pelayanan kawasan perbatasan; dan
5. meningkatnya kondisi perekonomian kawasan perbatasan, yang ditandai dengan meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi di 38 kabupaten/ kota perbatasan yang diprioritaskan penanganannya, khususnya pada 27 kabupaten perbatasan yang tergolong daerah tertinggal.

9.2.2.9 Daerah Tertinggal

Daerah tertinggal dapat diatasi dengan upaya:

1. meningkat rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal sebesar 6,6 persen pada tahun 2010 menjadi 7,1 persen pada tahun 2014;
2. berkurangnya persentase penduduk miskin di daerah tertinggal pada tahun 2010 sebesar 18,8 persen menjadi 14,2 persen pada tahun 2014; dan
3. meningkatnya kualitas sumberdaya manusia di daerah tertinggal yang ditunjukkan oleh peningkatan indeks pembangunan manusia (IPM) pada tahun 2010 sebesar 67,7 menjadi 72,2 pada tahun 2014

9.2.2.10 Kawasan Rawan Bencana

Pengelolaan kawasan rawan bencana diarahkan untuk:

1. terwujudnya pengarusutamaan pengurangan risiko bencana dalam kebijakan dan perencanaan pembangunan di tingkat nasional dan daerah, yang didukung kelembagaan penanggulangan bencana yang handal dan profesional di pusat dan daerah;
2. meningkatnya kesiapsiagaan masyarakat terhadap risiko bencana, melalui penguatan pengurangan risiko bencana berbasis komunitas dengan memperhatikan kearifan lokal;
3. terlaksananya penanganan kedaruratan pascabencana yang efektif, dan pemberian bantuan kemanusiaan di wilayah terkena dampak bencana alam dan kerusuhan sosial; dan
4. terlaksananya rehabilitasi dan rekonstruksi serta pembangunan berkelanjutan yang berdimensi pengurangan risiko bencana di wilayah yang terkena dampak bencana alam

9.2.2.11 Desentralisasi, Hubungan Pusat Daerah, dan Antardaerah

Meningkatnya efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah yang ditandai dengan tertatanya perumusan kebijakan dan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan pembagian urusan pemerintahan antartingkat pemerintahan, peningkatan kerja sama daerah dan manfaat yang diperoleh, pembatasan/penundaan pemekaran daerah, dan terlaksananya sistem pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik.

9.2.2.12 Tata Kelola dan Kapasitas Pemerintahan Daerah

Terwujudnya pemerintahan daerah yang memiliki kapasitas yang memadai untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah dalam kerangka NKRI yang ditandai dengan terbentuknya kelembagaan pemerintah daerah yang efisien dan efektif, meningkatnya efisiensi dan efektivitas penggunaan dana perimbangan daerah, aparatur pemerintah daerah dan anggota DPRD

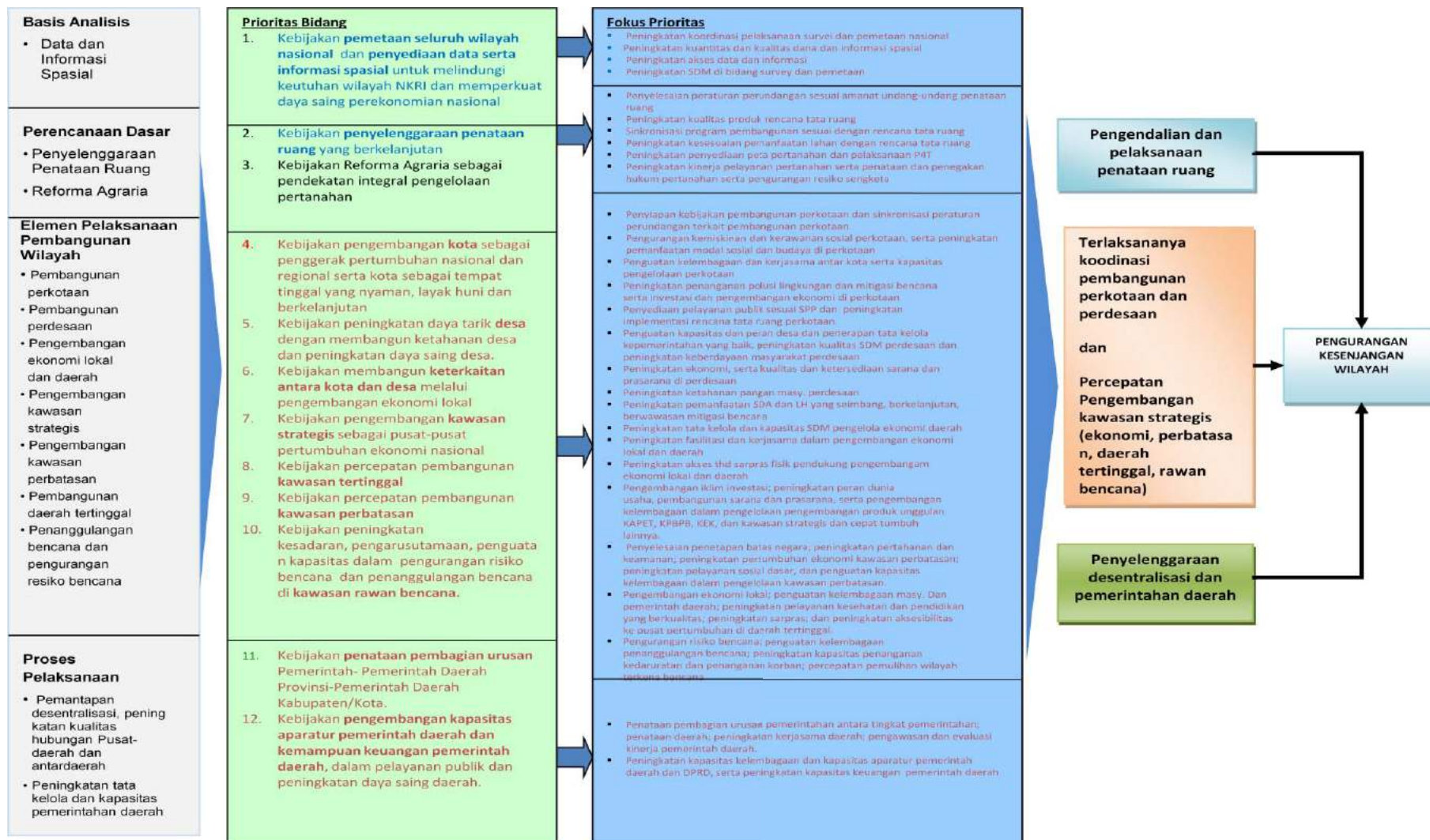


yang profesional, terlaksananya standar pelayanan minimal, serta penetapan dan pelaksanaan peraturan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

9.3 Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) dalam Pembangunan Bidang Wilayah dan Tata Ruang pada tahun 2010 - 2014, dilaksanakan dengan tujuan untuk mengurangi kesenjangan wilayah, yang dilaksanakan melalui 3 (tiga) arah kebijakan dan strategi utama, yaitu (1) pelaksanaan pengendalian dan pelaksanaan penataan ruang, (2) koordinasi dan integrasi pembangunan wilayah, baik dalam lingkup perkotaan dan perdesaan, maupun dalam lingkup kawasan-kawasan prioritas (kawasan-kawasan strategis, kawasan tertinggal, kawasan perbatasan, dan daerah rawan bencana), yang diperkuat dengan (3) penyelenggaraan desentralisasi dan pemerintahan daerah, dan dilaksanakan melalui 12 prioritas bidang. Pengendalian dan pelaksanaan penataan ruang dilaksanakan melalui: (1) kebijakan penguatan basis analisis data, informasi spasial, dan pemetaan seluruh wilayah nasional dalam pembangunan wilayah, serta (2) penyelenggaraan penataan ruang yang berkelanjutan. Koordinasi dan integrasi dalam pembangunan wilayah dilakukan melalui (3) kebijakan pengembangan kota sebagai pusat pertumbuhan, (4) peningkatan daya tarik desa, dan (5) membangun keterkaitan antara kota dan desa. Koordinasi dan integrasi pembangunan wilayah juga dilakukan melalui pengembangan kawasan-kawasan prioritas, baik (6) percepatan kawasan strategis sebagai pusat pertumbuhan ekonomi nasional, (7) percepatan pembangunan kawasan tertinggal dan (8) percepatan pembangunan kawasan perbatasan, serta (9) pengembangan pengarusutamaan dan kapasitas dalam pengurangan resiko bencana dan penanggulangan bencana di seluruh wilayah baik desa maupun kota. Keseluruhan pelaksanaan pengembangan kawasan didukung dengan (10) kebijakan reforma agraria sebagai pendekatan integral pengelolaan pertanahan. Sementara itu, penyelenggaraan desentralisasi dan pemerintahan daerah, merupakan dukungan utama untuk menjamin terlaksananya pembangunan wilayah, melalui (11) kebijakan penataan pembagian urusan antara pemerintah-pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota, serta (12) kebijakan pengembangan kapasitas aparatur pemerintah daerah dan kemampuan keuangan pemerintah daerah (*selengkapnya dapat dilihat dalam Gambar 9.15 Rencana Pembangunan Bidang Wilayah dan Tata Ruang*)

GAMBAR 9.15
RENCANA PEMBANGUNAN BIDANG WILAYAH DAN TATA RUANG



9.3.1 Pembangunan Data dan Informasi Spasial

Dalam menanggulangi berbagai permasalahan data dan informasi spasial, serta untuk mencapai sasaran ke depan, arah kebijakan pembangunan bidang data dan informasi spasial ke depan adalah untuk **menjaga keutuhan NKRI melalui pemetaan seluruh wilayah nasional, serta memperkuat daya saing perekonomian nasional melalui penyediaan data dan informasi spasial yang meningkatkan kualitas tahapan-tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring evaluasi dalam pembangunan nasional.**

Sementara itu, strategi prioritas bidang Data dan Informasi Spasial ke depan, terbagi ke dalam pokok-pokok sebagai berikut.

1. Strategi dalam meningkatkan koordinasi kegiatan survei dan pemetaan nasional adalah
 - a. menyusun strategi nasional bidang survei dan pemetaan;
 - b. menyusun kerangka perauran perundang-undangan tentang kegiatan survei dan pemetaan;
 - c. membangun kelembagaan survei dan pemetaan di semua instansi pemerintah dan swasta;
 - d. menyusun standar, prosedur, dan manual bidang survei dan pemetaan nasional.
2. Strategi dalam meningkatkan kuantitas dan kualitas data dan informasi spasial adalah
 - a. memprioritaskan kegiatan survei dan pemetaan nasional baik di darat maupun di laut pada wilayah nasional berikut :
 - (a) Wilayah nasional dengan nilai strategis keamanan dan pertahanan tinggi;
 - (b) Wilayah nasional yang terkena bencana nasional yang mengakibatkan perubahan rona muka bumi secara *massive*;
 - (c) Wilayah nasional yang belum tercakup kegiatan survei dan pemetaan;
 - (d) Wilayah dengan potensi kegiatan ekonomi tinggi;
 - (e) Wilayah dengan kegiatan ekonomi tinggi dengan data dan informasi tersedia dengan kualitas rendah terutama sebagai akibat jangka waktu valid data dan informasi telah terlampaui (20 tahun untuk data dasar dan 5 tahun untuk data tematik);
 - b. melakukan validasi (geometrik dan *seamless*) pada data digital yang ada;
 - c. melakukan produksi peta garis dalam format digital dengan mengolah data mentah yang ada.

3. Strategi dalam meningkatkan akses data dan informasi adalah
 - a. membangun jaringan JDSN hingga mencakup seluruh instansi pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan kota, instansi swasta serta universitas negeri;
 - b. membangun organisasi pendukung pada setiap instansi yang tergabung dalam JDSN;
 - c. menyusun dan melakukan evaluasi berkala atas standar teknis dan klasifikasi data informasi spasial.
4. Strategi dalam meningkatkan Sumber Daya Manusia di bidang survei dan pemetaan belum mencukupi adalah
 - a. mengembangkan lembaga pelatihan nasional bidang survei dan pemetaan nasional;
 - b. menyusun kurikulum dan silabus nasional bagi pelatihan survei dan pemetaan;
 - c. membangun kerjasama pelatihan dengan perguruan tinggi dalam bidang pelatihan bidang survei dan pemetaan nasional;
 - d. menyusun strategi nasional bagi pengembangan dan pengelolaan sumberdaya manusia bidang survei dan pemetaan.

9.3.2 Penyelenggaraan Penataan Ruang

Arah kebijakan dalam prioritas bidang penyelenggaraan penataan ruang adalah **mewujudkan penyelenggaraan penataan ruang yang berkelanjutan dengan meningkatkan kualitas rencana tata ruang, mengoptimalkan peran kelembagaan, dan diacunya rencana tata ruang dalam pelaksanaan pembangunan.**

Untuk mencapai arah kebijakan tersebut, dirumuskan strategi, yaitu :

1. mempercepat penyusunan dan pengesahan Rencana Tata Ruang dan peraturan perundangan pelaksanaan sebagai amanat UU No. 26 Tahun 2007
2. mewujudkan sinkronisasi program pembangunan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah
3. meningkatkan sosialisasi dan advokasi peraturan perundangan tata ruang dan NSPK Penataan Ruang kepada stakeholders terkait di tingkat pusat dan daerah
4. mempercepat penyelesaian sistem informasi penataan ruang terpadu, peta dasar dan tematik serta memanfaatkan pendekatan KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis) sebagai salah satu acuan dalam penyusunan rencana tata ruang dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan penataan ruang

5. meningkatkan kapasitas kelembagaan penataan ruang dengan meningkatkan kualitas SDM dan koordinasi antar sektor dan wilayah, dan membangun kerjasama dan kesepakatan antar wilayah
6. meningkatkan pengendalian pemanfaatan ruang
7. mengoptimalkan pengawasan penyelenggaraan penataan ruang termasuk didalamnya melalui pengendalian pemanfaatan ruang dan terbentuknya PPNS.
8. Fokus prioritas bidang penyelenggaraan penataan ruang adalah
9. penyelesaian peraturan perundangan sesuai amanat undang-undang penataan ruang
10. peningkatan kualitas produk rencana tata ruang
11. sinkronisasi program pembangunan sesuai dengan rencana tata ruang
12. peningkatan kesesuaian pemanfaatan lahan dengan rencana tata ruang

9.3.3 Reforma Agraria

Arah kebijakan yang dirumuskan untuk mencapai sasaran pembangunan pertanahan adalah “Melaksanakan pengelolaan pertanahan secara utuh dan terintegrasi melalui Reforma Agraria, sehingga tanah dapat dimanfaatkan secara berkeadilan untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat dan turut mendukung pembangunan berkelanjutan”. Arah kebijakan tersebut ditempuh melalui strategi sebagai berikut.

1. peningkatan penyediaan peta pertanahan dalam rangka legalisasi aset dan kepastian hukum hak atas tanah;
2. pengaturan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah (P4T) termasuk pengurangan tanah terlantar;
3. peningkatan kinerja pelayanan pertanahan;
4. penataan dan penegakan hukum pertanahan serta pengurangan potensi sengketa.

9.3.4 Pembangunan Perkotaan

Pembangunan perkotaan dalam periode tahun 2005–2025, sebagaimana diamanatkan dalam RPJP dijabarkan melalui (a) kebijakan pengendalian kota-kota besar dan metropolitan dengan fokus pada penerapan manajemen perkotaan yang meliputi optimasi dan pengendalian pemanfaatan ruang serta pengamanan zona penyangga di sekitar kota inti, pengembangan kegiatan ekonomi kota yang ramah lingkungan, serta revitalisasi kawasan kota yang meliputi pengembalian fungsi kawasan, peningkatan kualitas lingkungan fisik, sosial, budaya serta penataan kembali pelayanan fasilitas publik; (b) pembangunan kota menengah dan kecil, melalui pendekatan

memenuhi kebutuhan pelayanan dasar perkotaan sesuai dengan tipologi kota masing-masing; dan (c) pembangunan keterkaitan ekonomi kota-desa dalam 'sistem wilayah pengembangan ekonomi' yang memerlukan perluasan dan diversifikasi aktivitas ekonomi dan perdagangan (nonpertanian) di pedesaan yang terkait dengan pasar di perkotaan.

Arah kebijakan pembangunan perkotaan pada 2010–2014 adalah **mengembangkan kota sebagai suatu kesatuan kawasan/wilayah, yaitu kota sebagai pendorong pertumbuhan nasional dan regional serta kota sebagai tempat tinggal yang berorientasi pada kebutuhan penduduk kota.**

Prinsip pembangunan perkotaan adalah mewujudkan : (a) kota yang nyaman/layak huni, yaitu kota yang dapat memenuhi kebutuhan warganya akan kenyamanan hidup, fisik, sosial budaya dan lingkungan; (b) kota yang berkelanjutan, yaitu kota yang dapat mengantisipasi perubahan iklim dan bencana alam serta memenuhi keperluan hidup manusia kini dengan tanpa mengabaikan keperluan hidup manusia masa datang; (c) kota yang berkeadilan, yaitu kota yang menyediakan ruang hidup dan usaha bagi seluruh golongan masyarakat; serta (d) kota sebagai pendorong pertumbuhan yang mampu berkompetisi dalam perkembangan ekonomi global dengan memanfaatkan potensi sosial budaya dan kreatifitas lokal serta mampu menciptakan hierarki pasar bagi kota menengah, kecil dan pedesaan.

Arah kebijakan pembangunan kawasan perkotaan tersebut diwujudkan dalam 10 (sepuluh) fokus prioritas sebagai berikut :

1. **Menyiapkan kebijakan pembangunan perkotaan dan meningkatkan sinkronisasi peraturan perundangan terkait pembangunan perkotaan**
2. **Menurunkan tingkat kemiskinan perkotaan dilakukan dengan**
 - a. menyiapkan kebijakan dalam pengendalian pertumbuhan penduduk di perkotaan. Kementerian/Lembaga yang terkait dengan kegiatan ini adalah Kementerian Dalam Negeri. Kegiatan ini dilaksanakan melalui arah kebijakan dan strategi yang terkait dengan Bab II Bidang Pembangunan Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama.
 - b. mengembangkan kegiatan industri kreatif di kota besar/metropolitan, dan kegiatan industri agro di kota menengah. Kementerian/Lembaga yang terkait dengan kegiatan ini adalah Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata. Kegiatan ini dilaksanakan melalui arah kebijakan dan strategi yang terkait Bab III Bidang Ekonomi dan Bab II Bidang Pembangunan Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama.
 - c. menyiapkan kebijakan daerah pada sektor perumahan yang berpihak kepada kelompok masyarakat miskin perkotaan.



- d. menyelenggarakan fasilitasi pelaksanaan program-program pengentasan kemiskinan di perkotaan.
- 3. Menurunkan tingkat kerawanan sosial dan kriminalitas di perkotaan dilakukan dengan**
 - a. meningkatkan kapasitas kelembagaan pemerintah kota dalam pengendalian masalah sosial dan penyakit menular.
 - b. meningkatkan kesadaran hukum masyarakat perkotaan, dan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan kegiatan ini adalah Kementerian Perhubungan, dengan kegiatan yang selaras dengan arah kebijakan dan strategi yang terkait Bab III Bidang Ekonomi dan Bab V Bidang Sarana dan Prasarana.
 - c. meningkatkan kerukunan sosial masyarakat perkotaan, dan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan kegiatan ini adalah Kementerian Dalam Negeri, dengan kegiatan yang selaras dengan arah kebijakan dan strategi yang terkait Bab VI Bidang Politik.
 - d. menurunkan tingkat penggunaan narkoba dan penderita HIV/AIDS . Kementerian/Lembaga yang terkait dengan kegiatan ini adalah Kementerian Kesehatan dan Badan Narkotika Nasional, dengan melaksanakan kegiatan melalui arah kebijakan dan strategi yang terkait Bab VII Bidang Pertahanan Keamanan dan Bab II Bidang Pembangunan Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama.
 - e. meningkatkan keamanan kawasan perkotaan, yang dilakukan oleh Kementerian/Lembaga yang terkait yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk dilaksanakan melalui arah kebijakan dan strategi yang terkait Bab VII Bidang Pertahanan Keamanan.
 - 4. Meningkatkan pemanfaatan dan pengembangan modal sosial dan budaya di perkotaan dilakukan dengan**
 - a. meningkatkan peran lembaga masyarakat sebagai wadah interaksi dan partisipasi masyarakat perkotaan dalam proses pembangunan
 - b. memelihara dan mengembangkan warisan budaya lokal (bangunan warisan budaya dan sejarah, kegiatan dan produk budaya lokal) dan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan kegiatan ini adalah Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata yang melaksanakan kegiatan dengan arah kebijakan dan strategi yang terkait Bab II Bidang Pembangunan Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama
 - 5. Memperkuat kelembagaan dan kerjasama antarkota dilakukan dengan**

- a. mengembangkan sistem informasi dan database pembangunan perkotaan termasuk *e-planning* yang terintegrasi antar kota dan antar kota-kabupaten-provinsi-nasional
 - b. mengembangkan badan kerjasama pembangunan dan pengelolaan kawasan perkotaan khususnya kawasan metropolitan dan kerjasama antarkota (*sister city* dan *city sharing*) dalam aspek infrastruktur dan pengembangan investasi
 - c. menetapkan batasan pengembangan kawasan perkotaan
 - d. membangun infrastruktur perdagangan terpadu dan industri di kota menengah untuk mendorong keterkaitan kegiatan ekonomi kota-desa dan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan kegiatan ini adalah Kementerian Perdagangan dan Perindustrian yang melaksanakan kegiatan ini sesuai dengan arah kebijakan dan strategi yang terkait Bab III Bidang Ekonomi.
- 6. Menguatkan kapasitas pemerintah kota dalam perencanaan, penyelenggaraan, dan pengelolaan pembangunan perkotaan serta penerapan prinsip tata pemerintahan yang baik dilakukan dengan**
- a. meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah kota dalam perencanaan dan pembiayaan pembangunan kota dengan penerapan prinsip tata pemerintahan yang baik, termasuk penerapan *e-procurement* dan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan kegiatan ini adalah Kementerian Keuangan dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang melaksanakannya dengan arah kebijakan dan strategi yang terkait Bab III Bidang Ekonomi dan Bab VIII Bidang Hukum dan Aparatur.
 - b. mendorong kepemimpinan kota yang baik melalui pendidikan politik kepada masyarakat dalam pemilihan calon kepala daerah dan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan kegiatan ini adalah Komisi Pemilihan Umum, kegiatan ini dilaksanakan melalui arah kebijakan dan strategi yang terkait Bab VI Bidang Politik.
- 7. Meningkatkan penanganan polusi lingkungan dan mitigasi bencana dalam pengelolaan perkotaan dilakukan dengan**
- a. memberikan fasilitasi kepada pemerintah daerah dalam penyusunan regulasi dan pelaksanaan pembangunan perkotaan yang memperhatikan pengelolaan lingkungan dan berwawasan mitigasi bencana.
 - b. meningkatkan pemahaman dan kewaspadaan masyarakat dan aparatur pemerintah kota dalam mitigasi bencana dan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan kegiatan ini adalah Badan Nasional Penanggulangan Bencana

dan Kementerian Dalam Negeri. Kegiatan ini dilaksanakan melalui arah kebijakan dan strategi yang terkait prioritas bidang Penanggulangan Bencana dan Pengurangan Resiko Bencana dalam Bab IX Bidang Wilayah dan Tata Ruang.

- c. meningkatkan pemahaman masyarakat dalam pengelolaan lingkungan dan penegakan hukum lingkungan dan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan kegiatan ini adalah Kementerian Negara Lingkungan Hidup; kegiatan ini dilaksanakan melalui arah kebijakan dan strategi yang terkait Bab X Bidang SDA dan Lingkungan Hidup .
- 8. Meningkatkan investasi dan pembangunan ekonomi di perkotaan dilakukan dengan**
- a. mengembangkan potensi ekonomi lokal perkotaan melalui ekonomi informal dan pengelolaan pasar tradisional.
 - b. menciptakan iklim usaha kondusif di kota-kota kecil dan menengah dan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan kegiatan ini adalah Kementerian Dalam Negeri. Kegiatan ini dilaksanakan melalui arah kebijakan dan strategi yang terkait prioritas bidang Pengembangan Ekonomi Lokal dan Daerah dalam Bab IX Bidang Wilayah dan Tata Ruang.
 - c. meningkatkan kapasitas kelembagaan ekonomi perkotaan dan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan kegiatan ini adalah Kementerian Dalam Negeri; kegiatan ini dilaksanakan melalui arah kebijakan dan strategi yang terkait prioritas bidang Pengembangan Ekonomi Lokal dan Daerah dalam Bab IX Bidang Wilayah dan Tata Ruang.
- 9. Menyediakan pelayanan publik sesuai dengan Standar Pelayanan Perkotaan dilakukan dengan**
- a. menyusun dan melaksanakan Standar Pelayanan Perkotaan sesuai dengan tipologi kota.
 - b. meningkatkan pembangunan infrastruktur pelayanan publik perkotaan, termasuk sarana dan prasarana permukiman; sistem jaringan transportasi perkotaan; jalan; listrik; dan telekomunikasi dan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan kegiatan ini adalah Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian ESDM dan Kementerian Kominfo; kegiatan ini dilaksanakan melalui arah kebijakan dan strategi yang terkait Bab V Bidang Sarana dan Prasarana.
 - c. melaksanakan evaluasi terhadap inovasi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan dan pengelolaan infrastruktur pelayanan publik.
 - d. meningkatkan penyelenggaraan pengelolaan pelayanan publik.

10. Meningkatkan implementasi rencana tata ruang perkotaan dan pengendalian pemanfaatan ruang perkotaan dilakukan dengan

- a. meningkatkan pengendalian pelaksanaan rencana tata ruang dalam pembangunan perkotaan.
- b. mengembangkan keterpaduan dan fasilitasi pelaksanaan pembangunan perkotaan.
- c. menyiapkan mekanisme bank lahan untuk lahan terbangun perkotaan yang berpihak kepada kelompok masyarakat miskin perkotaan dan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan kegiatan ini adalah Badan Pertanahan Nasional; kegiatan ini dilaksanakan melalui arah kebijakan dan strategi yang terkait prioritas bidang Reforma Agraria dalam Bab IX Bidang Wilayah dan Tata Ruang.

9.3.5 Pembangunan Perdesaan

Arah kebijakan pembangunan perdesaan tahun 2010--2014 adalah memperkuat kemandirian desa dalam pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; meningkatkan ketahanan desa sebagai wilayah produksi; serta meningkatkan daya tarik perdesaan melalui peningkatan kesempatan kerja, kesempatan berusaha dan pendapatan seiring dengan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia dan lingkungan.

Berbagai pertimbangan utama yang perlu diperhatikan dalam pembangunan perdesaan pada lima tahun mendatang adalah (1) kegiatan pembangunan perdesaan di dalam kerangka wilayah bukan sektoral yang di dalamnya pembangunan perdesaan bukan merupakan penjumlahan dari seluruh kegiatan sektor masing-masing secara terpisah tetapi didasarkan pada kebutuhan wilayah perdesaan secara keseluruhan; (2) kegiatan ekonomi dan pembangunan lainnya diarahkan untuk memaksimalkan manfaat bagi daerah lokal melalui pemanfaatan sumberdaya lokal, fiskal maupun manusia dan budayanya; (3) pembangunan dilaksanakan melalui pemusatan perhatian terhadap kebutuhan, kapasitas, dan perspektif masyarakat lokal, yang berarti bahwa suatu wilayah seyogyanya mengembangkan kapasitasnya untuk melakukan pembangunan sosio-ekonomi yang khas wilayah tersebut; (4) pembangunan tidak terbatas hanya pada aspek ekonomi saja, tetapi juga ekologis, dan sosial kultural secara setara sehingga dapat tercipta pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*); dan (5) partisipasi masyarakat lokal dalam proses pengambilan keputusan terkait pembangunan perdesaan sangat penting karena ditentukan sendiri (*self-determined*) oleh masyarakat lokal dan mengacu kepada kebutuhan lokal.

Prinsip dalam pembangunan perdesaan, meliputi: (a) pemberdayaan dan pengembangan kapasitas masyarakat, yang berorientasi kepada karakteristik dan kebutuhan serta aspirasi lokal. Hal ini menitikberatkan pada proses pertumbuhan

ekonomi dan perubahan struktural yang dimotori oleh masyarakat lokal dengan memanfaatkan potensi-potensi lokal untuk pembangunan dalam upaya untuk mengatur dan mengurus kepentingan dan kesejahteraan masyarakat setempat; (b) Pembangunan yang partisipatif; Kepemimpinan lokal dan kelembagaan perdesaan berperan penting dalam proses menuju keberlanjutan pembangunan. Dengan mempertimbangkan aspek lokalitas (berbasis lokal), pembangunan desa dapat berjalan lebih mandiri dan berkelanjutan; (c) Berkelanjutan; Untuk menjaga keseimbangan ekosistem wilayah perdesaan diperlukan penataan ruang perdesaan yang dapat mendukung upaya pemberdayaan masyarakat, peningkatan kualitas lingkungan setempat dan wilayah

yang didukungnya, konservasi sumber daya alam, pelestarian warisan budaya lokal, pertahanan kawasan lahan pangan berkelanjutan yang memberikan kemandirian pangan bagi masyarakatnya, serta keseimbangan pembangunan perdesaan – perkotaan. Era globalisasi telah membawa dampak terjadinya perubahan tatanan baik di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya dan tidak terkecuali di bidang manajemen sumberdaya alam yang mempengaruhi kehidupan di perdesaan. Perubahan tersebut menuntut masyarakat untuk mempunyai daya adaptasi yang tinggi terhadap perubahan global ini terutama dalam upaya meningkatkan ketahanan pangan.

Dalam rangka mewujudkan sasaran, kebijakan pembangunan perdesaan dilaksanakan melalui dua pendekatan, yaitu: a) Pembangunan perdesaan dalam rangka memenuhi pelayanan dasar masyarakat dan wilayah perdesaan yang berkualitas melalui kecukupan penyediaan sarana prasarana pendidikan, kesehatan, komunikasi dan informatika, transportasi, energi, dan permukiman yang dilakukan terutama di daerah tertinggal, perbatasan, pulau-pulau kecil terluar/terdepan, desa konservasi, desa hutan, dan kawasan transmigrasi, dan lainnya; b) Pembangunan perdesaan dalam upaya membangun desa mandiri menuju daya saing desa, yang dapat dilakukan melalui pengembangan desa mandiri pangan, desa P2KP (percepatan penganekaragaman konsumsi pangan), desa mandiri energi, desa wisata, desa berbasis industri kreatif di bidang pariwisata, desa pendukung usaha pariwisata, desa siaga aktif, kawasan transmigrasi, dan lainnya.

Arah kebijakan pembangunan kawasan perdesaan diwujudkan dalam 7 (tujuh) fokus prioritas sebagai berikut.

1. Memperkuat kapasitas dan peran desa dan tata kelola pemerintahan desa yang baik dilakukan dengan

- a. meningkatkan perencanaan pembangunan desa yang partisipatif dan terpadu serta mengoptimalkan alokasi dana desa dan menggali sumber-sumber pendapatan asli desa.
- b. meningkatkan kapasitas pemerintahan desa dan kelembagaan dalam perencanaan, pelayanan publik, penggalan potensi lokal dan penggerak kegiatan kemasyarakatan.

- c. meningkatkan kapasitas dan kepedulian pemerintahan kabupaten/kota dalam pembangunan perdesaan.

Kementerian/ Lembaga yang terkait dengan kegiatan ini adalah Kementerian Dalam Negeri.

2. Meningkatkan kualitas dasar sumber daya manusia perdesaan dilakukan dengan

- a. meningkatkan taraf pendidikan dan kesehatan penduduk.
- b. meningkatkan angka kecukupan gizi.
- c. meningkatkan ketahanan mental spiritual masyarakat di kawasan transmigrasi.

Kementerian/ Lembaga yang terkait dengan kegiatan butir a dan b adalah Kementerian Pendidikan Nasional dan Kementerian Kesehatan. Kegiatan tersebut dilaksanakan melalui arah kebijakan dan strategi yang terkait dengan Bab II Bidang Sosial Budaya. Kegiatan tersebut juga dilaksanakan oleh Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

3. Meningkatkan keberdayaan masyarakat perdesaan dilakukan dengan

- a. meningkatkan partisipasi dan kapasitas masyarakat perdesaan.
- b. meningkatkan pembinaan dan pengakuan masyarakat adat dan budaya nusantara.
- c. meningkatkan peran serta pemuda dan perempuan.

Kementerian/ Lembaga yang terkait dengan kegiatan (i) dan (ii) adalah Kementerian Dalam Negeri, sedangkan kegiatan butir (iii) dilaksanakan oleh Kementerian Negara, Pemuda dan Olahraga, Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional melalui arah kebijakan dan strategi yang terkait dengan Bab II Bidang Sosial Budaya.

4. Meningkatkan ekonomi perdesaan dilakukan dengan

- a. meningkatkan peningkatan usaha ekonomi keluarga dan penguatan kelembagaan BUMDes/Kel.
- b. meningkatkan ketersediaan data dan informasi potensi perdesaan serta mengembangkan penelitian dan pengembangan untuk mendukung pengembangan ekonomi perdesaan.
- c. meningkatkan pengembangan dan pengelolaan pasar desa/lokal serta pengembangan informasi pasar.

- d. meningkatkan produktivitas dan pengembangan lahan, kemampuan masyarakat dalam penerapan teknologi tepat guna dan penyerapan informasi pasar, pembiayaan bagi usaha mikro dan kecil menengah, serta peningkatan usaha pengolahan hasil.
- e. meningkatkan penciptaan usaha melalui iklim investasi kondusif yang menstimulasi peran serta aktif masyarakat dan dunia usaha (swasta) dalam pembangunan perdesaan.

Kementerian/ Lembaga yang terkait dengan kegiatan ini adalah Kementerian Dalam Negeri. Butir (iv) dan (v) juga dilaksanakan oleh Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

5. Meningkatkan kualitas dan ketersediaan sarana dan prasarana dilakukan dengan

- a. meningkatkan ketersediaan rencana pembangunan kawasan dan rencana penataan persebaran penduduk.
- b. meningkatkan fungsi, ketersediaan sarana prasarana permukiman (jalan, drainase, sistem air bersih dan air minum, kelistrikan, pengembangan energi terbarukan, pengembangan bangunan fasilitas umum, internet, sarana telekomunikasi, transportasi dan revitalisasi rumah).
- c. meningkatkan pembangunan kawasan transmigrasi dalam bentuk Wilayah Pengembangan Transmigrasi (WPT) atau Lokasi Permukiman Transmigrasi (LPT) yang layak.
- d. pembangunan permukiman, pembangunan kawasan transmigrasi dan penataan ruang perdesaan.

Kementerian/ Lembaga yang terkait dengan kegiatan ini adalah Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Kegiatan butir (ii) juga dilaksanakan Kementerian Dalam Negeri. Kegiatan butir (ii) juga dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, dan Kementerian Perhubungan melalui arah kebijakan dan strategi yang terkait dengan Bab IV Bidang Sarana Prasarana.

6. Meningkatkan ketahanan pangan masyarakat perdesaan dilakukan dengan

- a. mengembangkan usaha ekonomi masyarakat pengelola Cadangan Pangan Pemerintah Desa (CPPD).
- b. pengembangan lahan dikawasan trasmigrasi.
- c. mengembangkan agribisnis perdesaan dan pembiayaan pertanian.
- d. melakukan upaya percepatan penganekaragaman konsumsi pangan, bantuan pangan dan penanganan rawan pangan.

- e. mengembangkan sumber air alternatif dalam mendukung peningkatan produksi pertanian.

Kementerian/Lembaga yang terkait dengan kegiatan ini adalah Kementerian Dalam Negeri untuk butir (i), dan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk butir (ii). Untuk kegiatan butir (iii), (iv), (v) dilaksanakan oleh Kementerian Pertanian.

7. Meningkatkan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang seimbang, berkelanjutan, berwawasan mitigasi bencana dilakukan dengan

- a. meningkatkan fasilitasi pengelolaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna.
- b. meningkatkan penyerasian lingkungan di kawasan transmigrasi yang serasi dengan daya dukung sumberdaya alam.
- c. meningkatkan fasilitasi perpindahan dan penempatan transmigrasi.

Kementerian/ Lembaga yang terkait dengan kegiatan ini adalah Kementerian Dalam Negeri untuk butir (i), dan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk butir (ii) dan (iii).

9.3.6 Pengembangan Ekonomi Lokal dan Daerah

Arah kebijakan pengembangan ekonomi lokal pada tahun 2010--2014 adalah **meningkatkan keterkaitan ekonomi antara desa-kota atau antara wilayah pusat pertumbuhan dengan wilayah produksi (hulu-hilir)**. Untuk dapat melaksanakannya, maka dilakukan dengan prinsip-prinsip: (a) berorientasi pada pengembangan rantai nilai komoditas, mulai dari tahap input, proses produksi, output, sampai dengan pemasaran; (b) dilakukan berdasarkan pengembangan sektor/ komoditas unggulan berbasis karakteristik dan kebutuhan serta aspirasi lokal (*locality*), dengan didukung oleh industri pengolahan sebagai sektor pendorong, dan sektor pendukung lainnya; serta (c) fokus pada pengembangan sistem pasar.

Arah kebijakan dan strategi pengembangan ekonomi lokal dan daerah tersebut diwujudkan dalam 5 (lima) fokus prioritas sebagai berikut :

1. Meningkatkan tata kelola ekonomi daerah dilakukan dengan

- a. menyusun kebijakan/regulasi yang mendukung pengembangan ekonomi lokal dan daerah;
- b. menyusun rencana tata ruang dan masterplan kegiatan kawasan yang berpotensi menjadi pusat pertumbuhan ekonomi lokal dan daerah yang baru;

- c. meningkatkan peran dan fungsi kelembagaan usaha ekonomi daerah, terutama di bidang permodalan dan perizinan usaha;
 - d. mengembangkan penelitian dan sistem data dan informasi potensi daerah dan kawasan yang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi lokal dan daerah;
 - e. mengembangkan sarana dan prasarana kelembagaan ekonomi lokal dan daerah; dan
 - f. melaksanakan pemantauan dan evaluasi tata kelola ekonomi daerah termasuk melaksanakan pemantauan dan evaluasi efisiensi dan efektivitas regulasi yang mendukung pengembangan ekonomi daerah.
2. **Meningkatkan kapasitas SDM pengelola ekonomi daerah dilakukan dengan**
- a. meningkatkan Kapasitas SDM Aparatur, terutama di bidang kewirausahaan (entrepreneurship);
 - b. meningkatkan Kompetensi SDM Stakeholder Lokal/ Daerah dalam mengembangkan usaha ekonomi daerah; serta
 - c. meningkatkan partisipasi stakeholder lokal/daerah dalam upaya pengembangan ekonomi daerah.
3. **Meningkatkan fasilitasi/ pendampingan dalam pengembangan ekonomi lokal dan daerah dilakukan dengan**
- a. mengembangkan lembaga fasilitasi pengembangan ekonomi lokal dan daerah yang terintegrasi secara lintas stakeholder (pemerintah, dunia usaha, dan akademisi), serta berkelanjutan, baik di pusat maupun di daerah; serta
 - b. meningkatkan kapasitas fasilitasi pengembangan ekonomi lokal dan daerah berbasis Iptek dan keterampilan.
4. **Meningkatkan kerjasama dalam pengembangan ekonomi lokal dan daerah dilakukan dengan**
- a. meningkatkan kerjasama antardaerah, terutama di bidang ekonomi baik antara daerah yang memiliki pusat-pusat pertumbuhan ekonomi lokal dan daerah dengan daerah belakangnya, maupun antara daerah tersebut dengan daerah lainnya;
 - b. meningkatkan kemitraan Pemerintah-Swasta dalam Pengembangan Ekonomi Lokal dan Daerah.
5. **Meningkatkan akses terhadap sarana dan prasarana fisik pendukung kegiatan ekonomi lokal dan daerah dilakukan dengan**
- a. mengembangkan prasarana dan sarana kawasan yang berpotensi menjadi pusat-pusat pertumbuhan ekonomi lokal dan daerah; dan

- b. membangun dan meningkatkan jaringan infrastruktur perhubungan, telekomunikasi, energi, serta air minum.

9.3.7 Pengembangan Kawasan Strategis

Dengan memperhatikan sasaran pengembangan kawasan strategis, kebijakan dalam 5 (lima) tahun ke depan diarahkan untuk mendorong pembangunan kawasan strategis sebagai pusat pertumbuhan ekonomi yang memiliki skala ekonomi yang berorientasi daya saing nasional dan internasional sehingga dapat menjadi motor penggerak percepatan pembangunan daerah tertinggal dan sekitarnya dalam suatu sistem wilayah pengembangan ekonomi yang terpadu dan sinergis, melalui keterkaitan mata-rantai proses produksi dan distribusi.

Arah kebijakan tersebut dijabarkan ke dalam strategi, melalui fokus prioritas sebagai berikut.

1. Percepatan pengembangan iklim investasi yang kondusif bagi pengembangan KAPET, KPBPB, dan KEK, dan kawasan strategis lainnya.
2. Meningkatkan peran dunia usaha dalam pengelolaan pengembangan produk unggulan KAPET, KPBPB, KEK, dan kawasan strategis lainnya.
3. Pembangunan sarana dan prasarana transportasi dan energi yang mendukung pengembangan kawasan strategis.
4. Pembentukan dan pengembangan kelembagaan pengelola KAPET, KPBPB, KEK, dan kawasan strategis lainnya.

Strategi pembangunan kawasan strategis melalui **percepatan pengembangan iklim investasi yang kondusif bagi pengembangan KAPET, KPBPB dan KEK serta kawasan strategis dan cepat tumbuh lainnya** dilaksanakan melalui penetapan kebijakan dalam rangka mendukung penciptaan iklim investasi yang kondusif melalui penyusunan kebijakan dan regulasi yang sinergis, di antaranya melalui: (a) penyusunan peraturan pelaksanaan pengembangan KEK sebagai penjabaran UU No. 39 tahun 2009; (b) peningkatan ekspor dan penanaman modal; (c) peningkatan aplikasi perizinan dan nonperizinan; serta (d) penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu (PTSP), fasilitas kepabeanan, cukai dan kerjasama perpajakan. Upaya tersebut merupakan koridor operasionalisasi kebijakan dan strategi pembangunan Bidang Ekonomi pada Bab III, untuk mendukung pembangunan kawasan strategis. Selain itu, masih dalam upaya mendorong kebijakan pro-growth dan pro-poor, dikembangkan pula strategi untuk membuka lapangan pekerjaan dan perlindungan terhadap tenaga kerja dalam upaya peningkatan kesejahteraan pekerja, serta hubungan industri yang memperhatikan struktur dan skala upah, aturan main pesangon, aturan main tenaga kontrak dan outsourcing.

Masih terkait dengan upaya peningkatan potensi perekonomian, strategi **meningkatkan peran dunia usaha dalam pengelolaan pengembangan produk**

unggulan KAPET, KPBPB, KEK, dan kawasan strategis lainnya akan dikembangkan untuk mendorong fasilitasi peran dunia usaha melalui pelatihan, dan pembukaan akses dunia usaha terhadap penciptaan produk unggulan dan pemasarannya. Kegiatan-kegiatan utama dalam peningkatan peran dunia usaha akan difasilitasi melalui: (a) peningkatan kinerja pengendalian kualitas produk-produk unggulan untuk ekspor melalui standar prosedur dan manual tentang penggunaan bahan baku lokal bagi industri; (b) pendampingan penerapan teknologi tepat guna bagi pelaku usaha dan efektifitas pemanfaatannya; (c) fasilitasi pengembangan UMKM guna kelancaran distribusi, pembinaan pemasaran, peningkatan nilai tambah produk, dan daya saing. Kegiatan terkait merupakan koridor operasionalisasi kebijakan dan strategi pembangunan di Bidang Ekonomi pada Bab III dalam rangka percepatan pembangunan kawasan strategis. Dalam skema strategi ini, digunakan pendekatan input, proses dan output dalam peningkatan daya saing produk yang diawali dengan pemanfaatan teknologi tepat guna, dan diikuti dengan kontrol kualitas dan efektifitas pengolahan produk, seperti pangan, tekstil, pariwisata, maupun produk unggulan lainnya dalam penyediaan bahan baku dan pengolahan di suatu kawasan. Selanjutnya, kepekaan dunia usaha terhadap potensi pasar dan mekanisme distribusi perlu ditingkatkan dalam rangka optimalisasi proses dan distribusi dalam merespon dinamika kecenderungan konsumsi masyarakat nasional dan internasional.

Strategi **pembangunan sarana dan prasarana transportasi dan energi yang mendukung pengembangan kawasan** dilaksanakan dalam rangka mengurangi tingginya biaya produksi yang dikeluarkan oleh dunia usaha sehingga dapat mengoptimalkan harga yang berdaya saing dengan produk impor yang relatif lebih murah. Permasalahan utama yang dialami selama ini adalah ketersediaan energi listrik yang sangat minim baik bagi kawasan industri maupun industri rumah tangga, serta terbatasnya mobilisasi distribusi melalui jaringan transportasi lokal, regional, nasional maupun internasional. Biaya yang dikeluarkan dalam proses distribusi yang relatif tinggi membutuhkan suatu kebijakan yang efektif, didukung oleh penegakan hukum yang tegas. Peningkatan intervensi pembangunan energi dan jaringan transportasi untuk membangun kawasan strategis dalam koridor operasionalisasi strategi pembangunan terkait dalam Bidang Sarana dan Prasarana pada BAB V dalam suatu arah kebijakan yang terintegrasi untuk pembangunan dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana berskala regional, nasional dan internasional di kawasan strategis.

Strategi dan fokus prioritas **pembentukan dan pengembangan kelembagaan pengelola KAPET, KPBPB, KEK, dan kawasan strategis lainnya** merupakan salah satu implementasi dari UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Hal ini terkait dengan upaya pengaturan hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antara pengelola kawasan dengan daerah untuk menjiwai semangat otonomi daerah dan desentralisasi. Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menentukan sikap dan arah kebijakannya terhadap fungsionalisasi pembangunan yang berbasis karakteristik daerah, yang sekaligus dalam rangka meningkatkan daya saing

terhadap daerah lainnya secara regional, nasional, dan internasional. Strategi ini diharapkan dapat menghasilkan suatu pengaturan mekanisme pengadministrasian pemerintahan di kawasan, dan terbentuknya intervensi pembangunan antara pemerintah daerah dengan lembaga pengelola kawasan serta pemerintah pusat yang sinergis. Kebijakan ini menjadi prioritas utama dalam prioritas bidang pengembangan kawasan strategis untuk mengawal efisiensi dan efektifitas kelembagaan dalam pelaksanaan koordinasi dan pengelolaan kawasan, sehingga sasaran pembangunan kawasan terutama KAPET, KPBPB dan KEK serta kawasan strategis lainnya dapat tercapai.

9.3.8 Pengembangan Kawasan Perbatasan

Dengan memperhatikan sasaran pembangunan kawasan perbatasan, arah kebijakan pengembangan kawasan perbatasan periode 2010—2014 adalah mempercepat pembangunan kawasan perbatasan di berbagai bidang sebagai beranda depan negara dan sebagai pintu gerbang aktivitas ekonomi dan perdagangan dengan negara tetangga secara terintegrasi dan berwawasan lingkungan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjamin pertahanan keamanan nasional. Dalam prioritas bidang ini, arah kebijakan tersebut dijabarkan melalui strategi sebagai berikut.

1. Penyelesaian penetapan dan penegasan batas wilayah Negara;
2. Peningkatan upaya pertahanan, keamanan, serta penegakan hukum;
3. Peningkatan pertumbuhan ekonomi kawasan perbatasan;
4. Peningkatan pelayanan sosial dasar;
5. Penguatan kapasitas kelembagaan dalam pengembangan kawasan perbatasan secara terintegrasi.

Strategi penyelesaian penetapan dan penegasan batas wilayah Negara merupakan salah satu langkah strategis untuk menjamin kedaulatan wilayah dan hak berdaulat (yurisdiksi) di perbatasan darat dan perbatasan laut. Upaya penetapan batas wilayah Negara dilaksanakan melalui penguatan diplomasi internasional atau perundingan batas wilayah Negara untuk menyelesaikan permasalahan segmen-segmen batas wilayah teritorial dan yurisdiksi (Zona Ekonomi Eksklusif, Landas Kontinen, dan Zona Tambahan) yang belum disepakati dengan negara tetangga. Upaya penegasan batas wilayah Negara juga dilakukan melalui pemetaan batas wilayah serta perbaikan dan pemeliharaan tugu batas (*investigation, refixation, and maintenance*). Kegiatan-kegiatan tersebut merupakan koridor dalam rangka operasionalisasi arah kebijakan dan strategi terkait dalam Bidang Politik pada Bab VI dan Bidang Pertahanan dan Keamanan pada Bab VII dalam rangka mendukung pengembangan kawasan perbatasan.

Upaya untuk menjamin kedaulatan wilayah, serta untuk mengurangi tindakan-tindakan ilegal yang banyak terjadi di kawasan perbatasan, seperti pembalakan liar, pencurian ikan, dan penyelundupan, diwujudkan dalam **Strategi Peningkatan Upaya**



Pertahanan, Keamanan, serta Penegakan hukum. Strategi ini dilaksanakan melalui: (a) peningkatan kesejahteraan aparaturnya Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang bertugas di kawasan perbatasan dan pulau kecil terdepan (terluar); (b) peningkatan ketersediaan dan kualitas materiel sarana dan prasarana pertahanan dan keamanan; (c) peningkatan pelayanan pos lintas batas (PLB) tradisional dan internasional untuk mengawasi dan memfasilitasi aktivitas lintas batas, termasuk penyediaan sarana dan prasarana penunjang yang memadai, seperti jalan, listrik, alat komunikasi, dan fasilitas kepabeanan, imigrasi, karantina, dan keamanan (*Custom, Immigration, Quarantine and Security/CIQS*); (d) peningkatan koordinasi antarinstansi dalam upaya penegakan hukum; (e) pelaksanaan kerjasama pertahanan dan keamanan dengan negara tetangga, serta (f) peningkatan wawasan kebangsaan masyarakat setempat. Kegiatan-kegiatan tersebut merupakan koridor dalam rangka operasionalisasi arah kebijakan dan strategi terkait dalam Bidang Politik pada Bab VI, Bidang Pertahanan dan Keamanan pada Bab VII, dan Bidang Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup Bab X, dalam rangka mendukung pengembangan kawasan perbatasan.

Upaya pengembangan perekonomian kawasan perbatasan diwujudkan melalui **Strategi Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Kawasan Perbatasan**, yang dilaksanakan melalui beberapa pendekatan, antara lain: (a) pengembangan kutub pertumbuhan; (b) pengisian dan pengembangan “ruang-ruang kosong”; (c) penguatan keterkaitan kota-desa khususnya PKSND dengan wilayah sekitarnya; (d) promosi pengembangan ekonomi lokal; (e) peningkatan kemandirian perekonomian desa-desa yang berbatasan langsung, termasuk yang berada di wilayah pesisir dan pulau kecil terdepan (terluar); serta (f) penciptaan interaksi ekonomi yang positif dan saling menguntungkan dengan negara tetangga. Berbagai pendekatan ini dimaksudkan untuk mengembangkan daya saing perekonomian kawasan perbatasan dengan berbasis kepada pengembangan keunggulan komparatif wilayah, misalnya potensi pertanian tanaman pangan, peternakan, perkebunan, perikanan dan kelautan, kerajinan, dan pariwisata, yang diselenggarakan secara terintegrasi antarsektor dan antarwilayah. Upaya-upaya yang dilaksanakan dalam strategi ini meliputi: (a) penyediaan sarana dan prasarana usaha; (b) peningkatan kemampuan berwirausaha masyarakat; (c) penerapan IPTEK dalam pengembangan potensi unggulan; (d) penyediaan fasilitas ekonomi; (e) penyelenggaraan transmigrasi; (f) penyediaan sarana dan prasarana wilayah seperti transportasi, telekomunikasi dan informasi, air bersih, dan energi; serta (g) peningkatan kemudahan berinvestasi bagi dunia usaha. Kegiatan-kegiatan tersebut merupakan koridor dalam rangka operasionalisasi arah kebijakan dan strategi terkait dalam Bidang Ekonomi pada Bab III, Bidang Sarana dan Prasarana pada Bab V, dan Bidang Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup pada Bab X, dalam rangka mendukung pengembangan kawasan perbatasan.

Upaya untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia di kawasan perbatasan, terutama masyarakat yang berada di wilayah kecamatan terdepan (terluar)

pada kawasan perbatasan negara diwujudkan melalui **Strategi Peningkatan Pelayanan Sosial Dasar**. Strategi ini dilaksanakan melalui upaya peningkatan pelayanan pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial, serta penyediaan permukiman yang layak dan memadai bagi masyarakat. Dalam aspek pendidikan, upaya yang dilakukan terutama melalui pemerataan distribusi guru di perbatasan, pemberian insentif atau tunjangan khusus bagi guru; penyediaan sarana dan prasarana sekolah, serta peningkatan kompetensi dan profesionalisme guru. Dalam aspek kesehatan, upaya yang dilakukan terutama melalui penyediaan puskesmas perawatan di perbatasan dan pulau-pulau kecil terdepan (terluar) berpenduduk; penyediaan RS bergerak yang memberikan pelayanan kesehatan rujukan; pemerataan distribusi tenaga kesehatan; pemberian insentif khusus bagi tenaga kesehatan; serta pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat miskin (Jamkesmas) di perbatasan. Dalam aspek kesejahteraan sosial, upaya yang dilakukan terutama melalui penanggulangan kemiskinan; pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT); serta peningkatan pelayanan sosial dasar bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) termasuk lansia dan penyandang cacat. Dalam aspek permukiman, upaya yang dilakukan terutama melalui pemberian bantuan stimulan peningkatan kualitas perumahan swadaya di kawasan perbatasan; fasilitasi penyediaan prasarana, sarana, utilitas perumahan swadaya bagi masyarakat berpenghasilan rendah di kawasan perbatasan; serta penataan kawasan perumahan di daerah tertinggal, perbatasan, dan pulau kecil terluar. Kegiatan-kegiatan tersebut merupakan koridor dalam rangka operasionalisasi arah kebijakan dan strategi terkait dalam Bidang Pembangunan Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama pada Bab II dan Bidang Sarana dan Prasarana pada Bab V, dalam rangka mendukung pengembangan kawasan perbatasan.

Upaya untuk memperkuat kelembagaan pengelolaan kawasan perbatasan diwujudkan melalui strategi **peningkatan kapasitas kelembagaan dalam upaya pengembangan kawasan perbatasan secara terintegrasi**. Strategi ini diarahkan untuk memperkuat koordinasi antarsektor dan antardaerah serta antartingkatan pemerintahan (pusat dan daerah) melalui pembentukan lembaga khusus yang menangani pengelolaan kawasan perbatasan; meningkatkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha; meningkatkan kualitas pelayanan pemerintahan; serta meningkatkan harmonisasi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengelolaan kawasan perbatasan.

9.3.9 Pembangunan Daerah Tertinggal

Dengan memperhatikan sasaran pembangunan daerah tertinggal, arah kebijakan pembangunan daerah tertinggal adalah untuk melakukan percepatan pembangunan daerah tertinggal dengan meningkatkan pengembangan perekonomian daerah dan kualitas sumberdaya manusia yang didukung oleh kelembagaan dan ketersediaan infrastruktur perekonomian dan pelayanan dasar sehingga daerah tertinggal dapat tumbuh dan berkembang secara lebih cepat guna dapat mengatasi ketertinggalan



pembangunannya dari daerah lain yang sudah relatif lebih maju. Arah kebijakan ini selanjutnya ditempuh melalui strategi pembangunan yang disesuaikan dengan karakteristik ketertinggalan suatu daerah. Percepatan pembangunan daerah tertinggal dilakukan melalui strategi sebagai berikut.

1. Pengembangan ekonomi lokal di daerah tertinggal;
2. Penguatan kelembagaan masyarakat dan pemerintah daerah dalam pengelolaan sumberdaya lokal di daerah tertinggal;
3. Peningkatan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau di daerah tertinggal;
4. Peningkatan pelayanan pendidikan yang berkualitas di daerah tertinggal;
5. Peningkatan sarana dan prasarana infrastruktur daerah tertinggal serta peningkatan aksesibilitas daerah tertinggal dengan pusat-pusat pertumbuhan.

Strategi ***pengembangan ekonomi lokal*** di daerah tertinggal ditujukan untuk mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumber daya alam secara berkelanjutan dengan menekankan pada pengembangan daerah pusat pertumbuhan, pusat produksi, serta meningkatkan pertumbuhan usaha mikro kecil menengah dan koperasi. Untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi lokal di daerah tertinggal, dibutuhkan dukungan penguatan sentra produksi/klaster usaha skala mikro dan kecil; dan pengembangan kawasan transmigrasi yang berada di daerah tertinggal, baik dari segi kualitas sumber daya manusia, maupun sarana dan prasarana kawasan transmigrasi. Upaya lain yang juga diperlukan dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas produk unggulan lokal, melalui dukungan pengembangan dan pendayagunaan. Kegiatan tersebut merupakan koridor dalam rangka operasionalisasi arah kebijakan dan strategi pembangunan yang terdapat dalam Bidang Ekonomi pada Bab III, serta Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi pada Bab IV, dalam rangka percepatan pembangunan daerah tertinggal.

Strategi ***penguatan kelembagaan masyarakat dan pemerintah daerah dalam pengelolaan sumberdaya lokal di daerah tertinggal*** diperlukan untuk meningkatkan perekonomian daerah tertinggal. Hal ini dilakukan melalui penguatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah, kelembagaan sosial masyarakat dan lembaga perekonomian lokal di daerah tertinggal. Di samping itu, penguatan kelembagaan perlu didukung dengan kerjasama antarlembaga, sehingga terjadi sinergi peran yang baik dan terpadu dalam rangka mengoptimalkan pengembangan ekonomi lokal di daerah tertinggal.

Strategi ***peningkatan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau di daerah tertinggal*** perlu didukung melalui peningkatan pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan khusus juga dibutuhkan untuk daerah tertinggal dan pulau-pulau kecil terdepan (terluar) melalui pelayanan medik spesialis di RS bergerak, pemberian insentif khusus terhadap tenaga kesehatan yang didayagunakan di daerah tertinggal dan

pulau kecil terdepan (terluar), serta pemberian Jamkesmas. Kegiatan tersebut merupakan koridor dalam rangka operasionalisasi arah kebijakan dan strategi pembangunan yang terdapat dalam Bidang Pembangunan Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama pada Bab II dalam rangka percepatan pembangunan daerah tertinggal.

Strategi ***peningkatan pelayanan pendidikan yang berkualitas di daerah tertinggal*** berorientasi pada upaya mengatasi permasalahan rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan angkatan kerja di daerah tertinggal. Peningkatan pelayanan pendidikan ini tidak hanya difokuskan pada pendidikan dasar, menengah dan kejuruan, tetapi terutama pada pendidikan luar sekolah berupa pendidikan ketrampilan hidup (*life-skill*) melalui lembaga kursus dan pelatihan lainnya yang berorientasi untuk meningkatkan kemampuan ketrampilan ekonomi produktif. Untuk mendukung pemerataan tenaga pendidik, diperlukan keberpihakan kepada daerah tertinggal melalui adanya pemberian insentif khusus terhadap tenaga pendidik yang berada di daerah tertinggal, serta adanya peningkatan kompetensi dan profesionalisme tenaga pendidik di daerah tertinggal. Kegiatan tersebut merupakan koridor dalam rangka operasionalisasi arah kebijakan dan strategi pembangunan yang terdapat dalam Bidang Pembangunan Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama pada Bab II, dalam rangka percepatan pembangunan daerah tertinggal.

Strategi ***peningkatan sarana dan prasarana di daerah tertinggal*** ditujukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan perbaikan kondisi perekonomian masyarakat. Dukungan terhadap sarana dan prasarana yang diperlukan diantaranya melalui pembangunan pasar tradisional, pembangunan jalan dan jembatan, transportasi keperintisan, permukiman, serta pembangunan sarana dan prasarana informatika di daerah tertinggal. Pengembangan sektor transportasi keperintisan, diharapkan dapat meningkatkan aksesibilitas daerah tertinggal dengan pusat-pusat pertumbuhan, sehingga terjadi keterkaitan pembangunan antara kawasan tertinggal dengan pusat pertumbuhan kawasan. Kegiatan tersebut merupakan koridor dalam rangka operasionalisasi arah kebijakan dan strategi pembangunan yang terdapat dalam Bidang Pembangunan Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama pada Bab II, dalam rangka percepatan pembangunan daerah tertinggal.

9.3.10 Penanggulangan Bencana dan Pengurangan Resiko Bencana

Untuk mencapai sasaran pengurangan risiko bencana, arah kebijakan yang akan ditempuh meliputi pengarusutamaan pengurangan risiko bencana sebagai prioritas pembangunan nasional dan daerah; penguatan kapasitas penanggulangan bencana di pusat dan daerah; optimalisasi instrumen pengendalian pemanfaatan ruang dalam aspek pengurangan risiko bencana; mendorong keterlibatan dan partisipasi masyarakat dalam upaya penanggulangan bencana dan pengurangan risiko bencana; peningkatan sumber daya penanganan kedaruratan dan bantuan kemanusiaan; serta percepatan pemulihan wilayah yang terkena dampak bencana. Melalui arah kebijakan ini diharapkan dapat diberikan dukungan bagi peningkatan kinerja penanggulangan



bencana serta peningkatan kesadaran terhadap risiko bencana dan peningkatan pemahaman tentang pentingnya kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana. Selanjutnya, arah kebijakan tersebut akan dilaksanakan dengan strategi pembangunan bidang sebagai berikut.

1. Pengurangan risiko bencana sebagai prioritas nasional dan daerah serta penguatan kelembagaan penanggulangan bencana, dengan fokus prioritas untuk pengurangan risiko bencana sebagai prioritas nasional dan daerah, serta penguatan kelembagaan penanggulangan bencana.
2. Peningkatan kapasitas penanganan kedaruratan dan penanganan korban yang terkena dampak bencana, melalui fokus prioritas untuk pelaksanaan tanggap darurat dan penanganan korban bencana alam dan kerusuhan sosial yang terkoordinasi, efektif dan terpadu melalui pembentukan satuan reaksi cepat, yang merupakan unit khusus penanganan bencana dengan dukungan moda transportasi udara yang memadai, dengan basis 2 (dua) lokasi strategis di Jakarta dan Malang, guna dapat segera menjangkau seluruh wilayah Indonesia.
3. Percepatan pemulihan wilayah terkena bencana dengan fokus prioritas untuk pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah pascabencana, khususnya di Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Sumatera Barat, serta wilayah pascabencana lainnya.

Strategi pembangunan bidang dalam upaya pengurangan risiko bencana dan penanggulangan bencana, merupakan pengejawantahan fungsi serta peran yang didasarkan pada sistem penanggulangan bencana dalam UU No 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan bencana yang meliputi subsistem prabencana, subsistem tanggap darurat, dan subsistem pascabencana (pemulihan). Kebijakan tersebut merupakan koridor dalam rangka operasionalisasi kebijakan dan strategi pembangunan yang memiliki keterkaitan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan bidang lainnya dalam Buku II RPJMN 2010-2014. Adapun strategi pembangunan yang menjiwai prioritas bidang pengurangan risiko bencana dan penanggulangan bencana, antara lain, adalah sebagai berikut.

Strategi ***pengurangan risiko bencana sebagai prioritas nasional dan daerah serta penguatan kelembagaan penanggulangan bencana*** dilaksanakan melalui: (a) pengarusutamaan pengurangan risiko bencana sebagai prioritas nasional dan daerah, yang implementasinya di antaranya melalui penyusunan rencana aksi daerah pengurangan risiko bencana, serta peningkatan kapasitas aparatur dalam upaya pengurangan risiko bencana di daerah, serta pembentukan kelembagaan penanggulangan bencana di daerah; (b) identifikasi, pengkajian, dan pemantauan risiko bencana serta penerapan sistem peringatan dini, yang pelaksanaannya diarahkan untuk pembuatan peta kawasan rawan bencana (KRB) gunung api, gempa bumi, tsunami, dan zona kerentanan gerakan tanah; pengembangan peta kebencanaan dan penyusunan peraturan pemerintah yang terkait dengan peta untuk kebencanaan, pengembangan basis data

bencana dan peta mikrozona rawan bencana, pengembangan sistem informasi bencana, pengembangan basis data multirawan bencana alam, serta penyusunan peta risiko bencana dan perubahan iklim; (c) pemanfaatan pengetahuan, inovasi, dan pendidikan untuk pengurangan faktor-faktor penyebab risiko bencana dan sekaligus membangun budaya keselamatan dan ketahanan ditingkat masyarakat, yang diarahkan untuk peramalan dan peringatan dini banjir; pengembangan materi pendidikan kebencanaan; pembuatan “greenbelt” untuk mitigasi bencana tsunami; penyusunan pedoman penataan ruang untuk mitigasi dan adaptasi perubahan iklim; serta pengembangan aplikasi teknologi informasi dan komunikasi untuk pengurangan risiko dan mitigasi bencana alam. Upaya pengurangan risiko bencana dan penanggulangan bencana tersebut banyak terkait dengan Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi pada Bab IV, Bidang Sarana dan Prasarana pada Bab V serta Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup pada Bab X dalam rangka operasionalisasi kebijakan dan strategi penanggulangan bencana dan pengurangan risiko bencana yang lebih sinergis dan terintegrasi.

Strategi ***peningkatan kapasitas penanganan kedaruratan dan penanganan korban yang terkena dampak bencana*** melalui fokus prioritas pelaksanaan tanggap darurat dan penanganan korban bencana alam dan kerusakan sosial yang terkoordinasi, efektif dan terpadu melalui pembentukan satuan reaksi cepat (SRC) yang merupakan unit khusus penanganan bencana yang didukung moda transportasi udara yang memadai dengan basis 2 (dua) lokasi strategis di Jakarta dan Malang sehingga segera dapat menjangkau seluruh wilayah Indonesia. Strategi ini juga merupakan salah satu prioritas nasional tentang Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana. Strategi ini diarahkan pada terciptanya penanganan kedaruratan yang efektif, dengan kegiatan utama meliputi penyusunan rencana kontijensi, pembentukan Satuan Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (SRC-PB) dengan melibatkan berbagai komponen baik pemerintah maupun masyarakat seperti TNI/Polri, kementerian/lembaga, Palang Merah Indonesia (PMI) dan masyarakat. Dalam kondisi pasca terjadinya bencana, kecepatan penanganan dan evakuasi korban yang terkena bencana merupakan prioritas utama dalam penanganan kedaruratan yang kemudian diikuti dengan penanganan pengungsi dan pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana. Strategi ini merupakan koridor kebijakan dan implementasi kapasitas penanganan kedaruratan dan penanganan pengungsi yang bersinergi dan terintegrasi dalam Bidang Pembangunan Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama pada Bab II.

Strategi ***percepatan pemulihan wilayah terkena bencana*** yang difokuskan pada rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah pascabencana Provinsi Jawa Barat, Provinsi Sumatera Barat, dan wilayah pascabencana lainnya. Mengingat tingginya kejadian bencana yang terjadi dalam kurun waktu lima tahun terakhir, yang mengakibatkan hancurnya hasil-hasil pembangunan yang telah diupayakan. Dengan demikian, dibutuhkan adanya upaya pemulihan melalui kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi yang diarahkan pada: (a) pemulihan bidang perumahan dan permukiman;

(b) pemulihan bidang prasarana/infrastruktur publik yang meliputi kegiatan pemulihan transportasi, energi, telekomunikasi, serta prasarana publik lainnya, yang kebijakan dan penjabarannya terdapat di dalam Bidang Sarana dan Prasarana pada Bab V; (c) pemulihan bidang sosial yang meliputi pemulihan sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, sosial dan keagamaan yang terintegrasi dalam Bidang Pembangunan Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama pada Bab II; (d) pemulihan bidang ekonomi melalui pemulihan sarana dan prasarana serta kegiatan ekonomi di daerah dan masyarakat di wilayah terkena bencana, yang secara rinci terintegrasi di dalam Bidang Ekonomi pada Bab III. Dalam rangka mendukung konsep pemulihan wilayah pascabencana menjadi lebih baik (*build back better*) maka setiap kegiatan pemulihan wilayah pascabencana dilakukan melalui kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi yang berdimensi pengurangan risiko bencana.

9.3.11 Pemantapan Desentralisasi, Peningkatan Kualitas Hubungan Pusat Daerah dan Antardaerah

Arah kebijakan prioritas bidang pemantapan desentralisasi, peningkatan kualitas hubungan pusat daerah, dan antardaerah adalah **menata pembagian urusan antara Pemerintah, pemerintahan daerah provinsi, dan pemerintahan daerah kabupaten/kota, meningkatkan kerja sama daerah, menunda untuk sementara waktu pembentukan daerah otonom baru, serta meningkatkan pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah.** Arah kebijakan pembangunan tersebut merupakan pedoman bagi penyusunan berbagai strategi pembangunan. Strategi pembangunan tersebut di antaranya adalah sebagai berikut.

1. Penataan Pembagian Urusan Pemerintahan antartingkat Pemerintahan

Strategi ini bertujuan untuk memperjelas pembagian kewenangan atas urusan pemerintahan dalam rangka mengurangi dan menghilangkan tumpang tindihnya kewenangan antartingkat pemerintahan dalam pelaksanaan suatu urusan pemerintahan serta penyelesaian penyusunan NSPK. Selain itu, strategi ini ditujukan untuk meningkatkan kualitas pemanfaatan sumber daya pembangunan sehingga menjadi lebih efisien. Hasil efisiensi yang didapat dari penataan pembagian urusan antartingkat pemerintahan tersebut akan dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan kegiatan lainnya yang dinilai lebih strategis dan berdampak lebih besar.

2. Penataan Daerah

Strategi ini bertujuan untuk memperkuat kerangka regulasi bagi penataan daerah ke depan, termasuk penyempurnaan terhadap persyaratan dan tata cara pembentukan/penghapusan/penggabungan daerah. Sehubungan dengan itu, akan dilakukan penundaan pemekaran daerah sampai dengan diselesaikannya evaluasi kinerja daerah otonom baru dan tersusunnya Strategi Dasar Penataan Daerah. Daerah otonom baru perlu ditingkatkan kapasitasnya agar dapat

memberikan pelayanan publik yang berkualitas dan mendorong peningkatan daya saing daerah secara mandiri. Kerangka regulasi tersebut disusun agar dapat memberikan arahan yang lebih tepat bagi usulan pemekaran daerah. Selain itu, regulasi tersebut memberikan landasan yuridis yang kuat dan dipergunakan sebagai acuan bersama oleh Pemerintah dan DPR dalam pembahasan usulan pembentukan daerah otonom baru. Muatan lainnya adalah meningkatnya kualitas pelaksanaan otonomi khusus di Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, dan daerah berkarakter khusus, yaitu DI Yogyakarta dan DKI Jakarta. Pelaksanaan otonomi daerah secara khusus di daerah-daerah tersebut tetap berada dalam kerangka NKRI.

3. Peningkatan Kerja Sama Daerah

Strategi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang potensial dikerjasamakan antarpemerintah daerah dan antara pemerintah daerah dengan dunia usaha. Di samping itu, kerja sama tersebut dapat memperkuat sistem dan regulasi bagi pengelolaan suatu isu atau kepentingan yang bersifat lintas daerah, misalnya wilayah aliran sungai dan wilayah perbatasan antardaerah, dalam bentuk kerja sama daerah. Strategi ini dapat mendukung upaya pembatasan usulan pemekaran daerah. Di masa yang akan datang, diupayakan agar kerja sama daerah memiliki kekuatan hukum dan memberikan manfaat yang nyata. Selain itu, dorongan dalam bentuk mekanisme insentif untuk penyelenggaraan kerja sama daerah juga perlu terus dilakukan, di samping upaya untuk mendiseminasikan pembelajaran atau keberhasilan berbagai bentuk kerja sama daerah yang telah ada ke daerah lain.

4. Pengawasan dan Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah

Strategi ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah secara umum yang meliputi: a) pengawasan dan koordinasi kebijakan, antara lain, dengan memperkuat peran Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD); b) pengawasan terhadap regulasi daerah, yaitu pengawasan dan evaluasi pada perda-perda bermasalah dan juga pengawasan regulasi di daerah-daerah yang termasuk dalam Otonomi Khusus; c) pengawasan keuangan daerah, yaitu pengawasan terhadap penggunaan dana yang berasal dari anggaran publik agar mampu meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan umum.

9.3.12 Perbaikan Tata Kelola dan Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Daerah

Arah kebijakan peningkatan kapasitas pemerintahan daerah adalah **membentuk pemerintah daerah yang mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas, mendorong terbentuknya organisasi perangkat daerah yang efisien dan efektif, serta memiliki kemampuan keuangan yang tinggi dan akuntabel sesuai dengan prinsip penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik.**



Selanjutnya, arah kebijakan tersebut akan dilaksanakan dengan strategi pembangunan, antara lain, sebagai berikut.

1. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah dan DPRD

Strategi ini mendorong pemerintah daerah untuk membentuk organisasi perangkat daerah yang sesuai dengan kebutuhan, kemampuan, serta potensi daerah. Pembentukan organisasi perangkat daerah ditujukan untuk dapat melaksanakan pelayanan publik berdasarkan SPM dan mendorong peningkatan daya saing daerah secara efektif (pemenuhan lingkup, jangkauan dan luas wilayah pelayanan) dan efisien (tidak membebani APBD dan APBN serta menambah birokrasi). Peningkatan lingkup, jangkauan dan luas wilayah pelayanan dilakukan dengan meningkatkan fungsi kecamatan agar dapat memberikan pelayanan secara terpadu pada jenis-jenis pelayanan tertentu sesuai dengan peraturan yang ada. Selain itu, organisasi perangkat daerah yang ada didorong untuk melakukan dan meningkatkan kerja sama daerah terutama pada wilayah perbatasan antardaerah dan wilayah-wilayah aliran sungai. Terhadap hal-hal tersebut, diperlukan suatu regulasi, sistem, dan pemahaman bersama berbagai pihak baik pemerintah (K/L) maupun pemerintahan daerah (termasuk kepala daerah dan DPRD).

Di samping itu, strategi ini juga berisikan upaya penyusunan regulasi yang tepat bagi daerah, baik dari sisi proses, prosedur penyusunannya, maupun dari sisi materi (substansi pengaturan) dari regulasi daerah tersebut. Untuk itu, akan dilakukan peningkatan kapasitas DPRD sebagai bagian dari pemerintahan daerah sehingga tercipta pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah secara tepat, dan terjadi keseimbangan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Di samping itu, DPRD dapat bekerja sama dengan pemerintah daerah secara baik dalam menyusun APBD sehingga penetapan APBD dapat tepat waktu dan dapat menyusun regulasi daerah secara tepat.

2. Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah dan Anggota DPRD

Strategi ini mendorong aparatur pemerintah daerah agar berfungsi menjadi fasilitator dalam rangka peningkatan pelayanan publik berdasarkan SPM, penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta pembangunan. Untuk itu, diperlukan regulasi, sistem, dan budaya kerja bagi aparatur pemerintah daerah yang mampu memberikan kepastian hukum, kenetralan dalam politik, kemudahan bekerja, kesesuaian pekerjaan dengan tingkat kompetensi, kejelasan jenjang karir (termasuk mutasi, rotasi, dan promosi secara lintas organisasi, lintas daerah, dan lintas tingkatan pemerintah), serta sistem *reward* dan *punishment* yang tepat dan memadai. Strategi peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah juga meliputi upaya agar pemimpin daerah melakukan berbagai inovasi peningkatan pelayanan publik dengan berdasarkan kemampuan keuangan pemerintah daerah yang ada. Strategi ini juga dimaksudkan sebagai

upaya untuk dapat menjamin keutuhan mata rantai pelaksanaan kebijakan nasional di daerah. Seiring dengan itu, untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, pelatihan teknis dan substantif akan terus dilakukan, baik oleh pelaksana diklat di pusat maupun di daerah. Dalam kerangka itu, pelatihan diklat yang ada ditujukan bagi upaya dan dukungan pencapaian standar pelayanan yang telah ditetapkan.

Selain itu, akan dilakukan juga peningkatan kapasitas anggota legislatif daerah. Hal ini ditujukan untuk meningkatkan kemampuan anggota DPRD dalam penyusunan regulasi yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat, pelayanan publik, dan daya saing daerah. Peningkatan kapasitas anggota DPRD juga akan dilakukan agar harmonisasi peraturan perundang-undangan daerah dengan peraturan perundang-undangan di atasnya tetap terjaga.

3. Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah

Strategi ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan dana perimbangan dan meningkatkan kapasitas keuangan pemerintah daerah baik dari aspek sumber-sumber penerimaan daerah maupun dari aspek pemanfaatan dan pengelolaan keuangan daerah. Peningkatan kapasitas keuangan pemerintah daerah ini diarahkan untuk dapat mendanai pelayanan publik berdasarkan SPM, dan untuk mendukung iklim usaha yang kondusif di daerah tersebut. Upaya bagi peningkatan kapasitas keuangan pemerintah daerah juga diarahkan untuk meningkatkan kemampuan daerah dalam mengelola sumber daya daerah dan meningkatkan kemampuan pengelolaan keuangan daerah. Oleh karena itu, akan dilakukan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan keuangan pemerintah daerah secara profesional dan akuntabel, termasuk dalam penggunaan sistem akuntansi berbasis teknologi informasi.

**RENCANA TINDAK PRIORITAS BIDANG
WILAYAH DAN TATA RUANG**

BIDANG PEMBANGUNAN : WILAYAH DAN TATA RUANG
PRIORITAS BIDANG : Pembangunan Data dan Informasi Spasial

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010 - 2014 (Rp. Miliar)
				2010	2014			
I	Peningkatan koordinasi kegiatan survei dan pemetaan nasional	Tersusunnya kerangka peraturan perundang-undangan tentang kegiatan survei dan pemetaan	Jumlah kerangka peraturan perundang-undangan tentang kegiatan survei dan pemetaan	1 UU	1 UU, 4 PP, 2 Perpres, 3 Kep KA-BAKOSURTANAL, 2 dokumen reformasi birokrasi ^{KJ}			67,22
		Tersusunnya Standar, Prosedur, dan Manual bidang survei dan pemetaan nasional	Jumlah dokumen Standar, Prosedur, dan Manual bidang survei dan pemetaan nasional	12 SNI	60 SNI ^{KJ}			

BIDANG PEMBANGUNAN

: WILAYAH DAN TATA RUANG

PRIORITAS BIDANG

: Pembangunan Data dan Informasi Spasial

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010 - 2014 (Rp. Miliar)
				2010	2014			
a	Pembangunan Infrastruktur Data Spasial	Rancangan rumusan kebijakan teknis, rencana dan program di bidang pembangunan Infrastruktur Data Spasial	Jumlah dokumen SNI	12	60 ^{k)}	Survei dan Pemetaan Nasional	BAKOSURTANAL	13,5
			Jumlah peraturan per-UU-an dan jumlah dokumen penyelenggaraan reformasi birokrasi	1 UU	1 UU, 4 PP, 2 Perpres, 3 Kep KA-BAKOSURTANAL, 2 dokumen reformasi birokrasi	Survei dan Pemetaan Nasional	BAKOSURTANAL	10,9
b	Pemetaan Dasar Rupabumi dan Tata Ruang	Kebijakan pemetaan dasar rupabumi dan meningkatnya jumlah cakupan peta rupabumi Indonesia	Jumlah Dokumen Norma Spesifikasi Pedoman Kriteria (NSPK)	5	25 ^{k)}	Survei dan Pemetaan Nasional	BAKOSURTANAL	7,0
			Jumlah dokumen pelaksanaan Koordinasi penyelenggaraan Pemetaan Dasar Rupabumi dan Tata Ruang	5	25 ^{k)}	Survei dan Pemetaan Nasional	BAKOSURTANAL	13,5
c	Pemetaan Dasar Kelautan dan Kedirgantaraan	Kebijakan pemetaan dasar kelautan dan kedirgantaraan serta meningkatnya cakupan peta dasar kelautan dan kedirgantaraan	Kualitas kerjasama, sinergi, koordinasi, program dan kegiatan, serta diseminasi data spasial kelautan dan kedirgantaraan nasional	2	10 ^{k)}	Survei dan Pemetaan Nasional	BAKOSURTANAL	2,6
d	Peningkatan Ketersediaan Data dan Informasi Survei Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Matra Darat	Tersedianya data dan informasi spasial SDA dan LH tematik matra darat	Jumlah dokumen rumusan kebijakan dan NSPK survei dan pemetaan SDA dan LH tematik matra darat	1	5 ^{k)}	Survei dan Pemetaan Nasional	BAKOSURTANAL	6,3
e	Peningkatan Ketersediaan Data dan Informasi Survei Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Matra Laut	Tersedianya data dan informasi spasial SDA dan LH tematik matra laut	Jumlah dokumen rumusan kebijakan dan NSPK survei SDA dan LH tematik matra laut	1	5 ^{k)}	Survei dan Pemetaan Nasional	BAKOSURTANAL	6,6

BIDANG PEMBANGUNAN : WILAYAH DAN TATA RUANG
PRIORITAS BIDANG : Pembangunan Data dan Informasi Spasial

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010 - 2014 (Rp. Miliar)
				2010	2014			
f	Penyusunan Atlas Sumberdaya dan Kajian Pengembangan Wilayah.	Tersedianya data dan informasi atlas serta pengembangan wilayah	Jumlah dokumen rumusan kebijakan dan NSPK atlas serta kajian pengembangan wilayah	0	4 ^{K)}	Survei dan Pemetaan Nasional	BAKOSURTANAL	5,6
g	Pembangunan Data dan Informasi Geodesi dan Geodinamika	Rancangan rumusan kebijakan teknis, rencana dan program di bidang pembangunan data dan informasi geodesi dan geodinamika	Jumlah dokumen kebijakan teknis di bidang data dan informasi geodesi dan geodinamika	1	5 ^{K)}	Survei dan Pemetaan Nasional	BAKOSURTANAL	1,2
II	Peningkatan kuantitas dan kualitas data dan informasi spasial	Tersedianya peta dasar dan peta tematik untuk perencanaan wilayah dan sektoral	Jumlah kerangka dasar dan data dasar nasional	97 NLP	487 NLP ^{K)}			1032,6
			Jumlah peta dasar nasional	312 NLP	2632 NLP ^{K)}			
			Jumlah peta tematik nasional	200 NLP	1242 NLP ^{K)}			
a	Pemetaan Batas Wilayah	Kebijakan pemetaan batas wilayah dan meningkatnya cakupan peta batas wilayah	Jumlah NLP Peta batas wilayah negara (joint Mapping) koridor perbatasan darat RI-PNG, RI-Malaysia skala 1:50.000	0	44 ^{K)}	Survei dan Pemetaan Nasional	BAKOSURTANAL	4,4
			Jumlah NLP pemetaan kecamatan kawasan perbatasan darat RI-PNG, RI-Malaysia, dan RI-RDTL skala 1:50.000 serta skala 1:25.000	72	161 ^{K)}	Survei dan Pemetaan Nasional	BAKOSURTANAL	13,1
			Jumlah pulau pemetaan pulau-pulau terluar	25	58 ^{K)}	Survei dan Pemetaan Nasional	BAKOSURTANAL	2,4
			Jumlah daerah penataan batas provinsi/kab/kota	0	36 ^{K)}	Survei dan Pemetaan Nasional	BAKOSURTANAL	4,3

BIDANG PEMBANGUNAN

: WILAYAH DAN TATA RUANG

PRIORITAS BIDANG

: Pembangunan Data dan Informasi Spasial

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010 - 2014 (Rp. Miliar)
				2010	2014			
			Jumlah wilayah dalam pemetaan wilayah provinsi	0	33 ^{K)}	Survei dan Pemetaan Nasional	BAKOSURTANAL	4,5
			Jumlah wilayah dalam pemetaan wilayah kabupaten	40	397 ^{K)}	Survei dan Pemetaan Nasional	BAKOSURTANAL	7,4
			Jumlah wilayah dalam pemetaan wilayah kota	0	98 ^{K)}	Survei dan Pemetaan Nasional	BAKOSURTANAL	4,5
			Jumlah (Border Sign Post) BSP RI-RDTL	0	240 ^{K)}	Survei dan Pemetaan Nasional	BAKOSURTANAL	2,6
			Jumlah Perapatan pilar batas RI-Malaysia	22	110 ^{K)}	Survei dan Pemetaan Nasional	BAKOSURTANAL	12,1
			Jumlah Perapatan pilar batas RI-PNG	0	20 ^{K)}	Survei dan Pemetaan Nasional	BAKOSURTANAL	4,9
			Jumlah Perapatan pilar batas RI-RDTL	60	300 ^{K)}	Survei dan Pemetaan Nasional	BAKOSURTANAL	6,1
			Jumlah dokumen perundingan teknis batas darat	3	15 ^{K)}	Survei dan Pemetaan Nasional	BAKOSURTANAL	6,3
			Jumlah dokumen perundingan teknis batas maritim	3	17 ^{K)}	Survei dan Pemetaan Nasional	BAKOSURTANAL	6,0
			Jumlah dokumen kajian LKI>200 NM	1	6 ^{K)}	Survei dan Pemetaan Nasional	BAKOSURTANAL	3,6

BIDANG PEMBANGUNAN

: WILAYAH DAN TATA RUANG

PRIORITAS BIDANG

: Pembangunan Data dan Informasi Spasial

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010 - 2014 (Rp. Miliar)
				2010	2014			
			Jumlah dokumen pengkajian dan Pemetaan batas negara dan geopolitik	1	5 ^{K)}	Survei dan Pemetaan Nasional	BAKOSURTANAL	4,0
			Jumlah NLP penyusunan dan pemeliharaan basisdata batas wilayah	110	1130 ^{K)}	Survei dan Pemetaan Nasional	BAKOSURTANAL	3,4
b	Pemetaan Dasar Rupabumi dan Tata Ruang	Kebijakan pemetaan dasar rupabumi dan meningkatnya jumlah cakupan peta rupabumi Indonesia	Jumlah Nomor Lembar Peta (NLP) Peta Rupabumi skala 1:10.000 (Sumatera & selatan Jawa)	90	724 ^{K)}	Survei dan Pemetaan Nasional	BAKOSURTANAL	32,0
			Jumlah NLP Peta Rupabumi skala 1:50.000 wilayah gap	160	1490 ^{K)}	Survei dan Pemetaan Nasional	BAKOSURTANAL	411,5
			Jumlah NLP Peta Rupabumi skala 1:250.000 wilayah gap	0	60 ^{K)}	Survei dan Pemetaan Nasional	BAKOSURTANAL	48,0
			Jumlah NLP gasetir dan model penataan ruang provinsi	400	2000 ^{K)}	Survei dan Pemetaan Nasional	BAKOSURTANAL	9,5
			Jumlah NLP Basis Data Geospasial skala 1:10.000 (Sumatera & selatan Jawa), 1:50.000, dan 1:250.000	250	2274 ^{K)}	Survei dan Pemetaan Nasional	BAKOSURTANAL	11,0

BIDANG PEMBANGUNAN

: WILAYAH DAN TATA RUANG

PRIORITAS BIDANG

: Pembangunan Data dan Informasi Spasial

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010 - 2014 (Rp. Miliar)
				2010	2014			
c	Pemetaan Dasar Kelautan dan Kedirgantaraan	Kebijakan pemetaan dasar kelautan dan kedirgantaraan serta meningkatnya cakupan peta dasar kelautan dan kedirgantaraan	Survei batimetri lepas pantai line km	13680	68400 ^{K)}	Survei dan Pemetaan Nasional	BAKOSURTANAL	21,5
			Jumlah liputan data spasial batimetri, Pantai (LPI) dalam ln km	34000	265000 ^{K)}	Survei dan Pemetaan Nasional	BAKOSURTANAL	34,6
			Percepatan Survei Hidrografi pantai multibeam line km	30000	225000 ^{K)}	Survei dan Pemetaan Nasional	BAKOSURTANAL	16,1
			Jumlah NLP Peta LPI skala 1:25K, 1:50K, 1:250K dan LLN 1:500K	52	292 ^{K)}	Survei dan Pemetaan Nasional	BAKOSURTANAL	11,1
			Pembuatan Peta LBI	2	15 ^{K)}	Survei dan Pemetaan Nasional	BAKOSURTANAL	3,3
			Pembuatan peta navigasi udara (Aeronautical Chart)	8	51 ^{K)}	Survei dan Pemetaan Nasional	BAKOSURTANAL	5,7
			Peta Resmi tingkat peringatan tsunami	2	16 ^{K)}	Survei dan Pemetaan Nasional	BAKOSURTANAL	1,9
			Jumlah liputan peta dasar kelautan dan kedirgantaraan dan basis data kelautan dan kedirgantaraan	1	5 ^{K)}	Survei dan Pemetaan Nasional	BAKOSURTANAL	12,1
			Pemutakhiran peta dasar kelautan dan kedirgantaraan serta basis data kelautan dan kedirgantaraan	4	41 ^{K)}	Survei dan Pemetaan Nasional	BAKOSURTANAL	0,9
d	Peningkatan Ketersediaan Data dan Informasi Survei Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Matra Laut	Tersedianya data dan informasi spasial SDA dan LH tematik matra laut	Jumlah produk inventarisasi, neraca, kajian aplikasi tekno surta, remote sensing/GIS, dinamika geografis SDA dan kajian wilayah LH matra laut yang diatur dan dikelola sebagai basis data pemetaan nasional	18 NLP(@5 tema) dan 4 dok	90 NLP(@5 tema) dan 20 dok	Survei dan Pemetaan Nasional	BAKOSURTANAL	46,5

BIDANG PEMBANGUNAN

: WILAYAH DAN TATA RUANG

PRIORITAS BIDANG

: Pembangunan Data dan Informasi Spasial

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010 - 2014 (Rp. Miliar)
				2010	2014			
e	Peningkatan Ketersediaan Data dan Informasi Survei Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Matra Darat	Tersedianya data dan informasi spasial SDA dan LH tematik matra darat	Jumlah NLP produk inventarisasi, neraca, kebencanaan, kajian aplikasi tekno surta, remote sensing, dinamika geografis dan kajian wilayah, SDA dan LH matra darat yang diatur dan dikelola sebagai basis data pemetaan nasional.	25	225 ^{K)}	Survei dan Pemetaan Nasional	BAKOSURTANAL	31,9
f	Pembangunan Data dan Informasi Geodesi dan Geodinamika	Rancangan rumusan kebijakan teknis, rencana dan program di bidang pembangunan data dan informasi geodesi dan geodinamika	Jumlah stasiun tetap GPS dan perawatan sistem	78	458 ^{K)}	Survei dan Pemetaan Nasional	BAKOSURTANAL	40,5
			Jumlah Pembangunan stasiun tetap GPS	12	22 ^{K)}	Survei dan Pemetaan Nasional	BAKOSURTANAL	7,0
			Jumlah pembangunan stasiun pasang surut laut	7	7 ^{K)}	Survei dan Pemetaan Nasional	BAKOSURTANAL	3,5
			Jumlah jaring kontrol geodesi dan geodinamika yang dirawat	150	950 ^{K)}	Survei dan Pemetaan Nasional	BAKOSURTANAL	15,1
			Jumlah stasiun pasang surut laut yang dirawat	88	468 ^{K)}	Survei dan Pemetaan Nasional	BAKOSURTANAL	16,6
			Jumlah stasiun permanen gayaberat yang dirawat	0	4 ^{K)}	Survei dan Pemetaan Nasional	BAKOSURTANAL	0,4
			Jumlah basis data geodesi dan geodinamika	1	5 ^{K)}	Survei dan Pemetaan Nasional	BAKOSURTANAL	0,7

BIDANG PEMBANGUNAN : WILAYAH DAN TATA RUANG
PRIORITAS BIDANG : Pembangunan Data dan Informasi Spasial

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010 - 2014 (Rp. Miliar)
				2010	2014			
g	Penyusunan Atlas Sumberdaya dan Kajian Pengembangan Wilayah	Tersedianya data dan informasi atlas serta pengembangan wilayah	Jumlah dokumen kajian model spasial dinamis serta difusi, diseminasi atlas dan kajian pengembangan wilayah	2	6 ^{K)}	Survei dan Pemetaan Nasional	BAKOSURTANAL	93,3
			Jumlah daerah (propinsi dan kabupaten) untuk pelaksanaan akses, utilitas data dan informasi atlas sumberdaya dan kajian pengembangan wilayah	14	70 ^{K)}	Survei dan Pemetaan Nasional	BAKOSURTANAL	14,5
			Jumlah dokumen produk atlas sumberdaya beserta basisdatanya	18	84 ^{K)}	Survei dan Pemetaan Nasional	BAKOSURTANAL	40,4
h	Pembangunan Infrastruktur Data Spasial	Rancangan rumusan kebijakan teknis, rencana dan program di bidang pembangunan Infrastruktur Data Spasial	Jumlah metadata simpul jaringan pusat	3	13 ^{K)}	Survei dan Pemetaan Nasional	BAKOSURTANAL	3,5
			Jumlah metadata simpul jaringan provinsi	3	15 ^{K)}	Survei dan Pemetaan Nasional	BAKOSURTANAL	3,5
			Jumlah metadata simpul jaringan kabupaten/kota	4	19 ^{K)}	Survei dan Pemetaan Nasional	BAKOSURTANAL	6,4
III	Peningkatan akses data dan informasi	Terbangunnya jaringan JDSN di seluruh instansi pemerintah pusat, pemerintah propinsi, pemerintah kab/kota, serta universitas negeri	Cakupan jaringan JDSN di instansi pemerintah pusat (14 simpul), pemerintah propinsi (28 simpul), pemerintah kab/kota (480 simpul) menjadi 100%	70 simpul	522 simpul ^{K)}			908,2
			Laporan hasil evaluasi berkala atas standar teknis dan klasifikasi data informasi spasial (setiap 3 atau 5 tahun)	0	1 ^{K)}			

BIDANG PEMBANGUNAN : WILAYAH DAN TATA RUANG
PRIORITAS BIDANG : Pembangunan Data dan Informasi Spasial

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010 - 2014 (Rp. Miliar)
				2010	2014			
a	Peningkatan Ketersediaan Data dan Informasi Survei Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Matra Laut	Tersedianya data dan informasi spasial SDA dan LH tematik matra laut	Jumlah akses, diseminasi dan utilitas informasi data spasial tematik SDA dan LH matra laut	33 Prov, 6 K/L	33 Prov, 6 K/L	Survei dan Pemetaan Nasional	BAKOSURTANAL	13,3
b	Peningkatan Ketersediaan Data Dan Informasi Survei Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup Matra Darat	Tersedianya data dan informasi spasial SDA dan LH tematik matra darat	Jumlah akses, diseminasi dan utilitas informasi data spasial tematik SDA dan LH matra darat	33 Prov, 6 K/L	33 Prov, 6 K/L	Survei dan Pemetaan Nasional	BAKOSURTANAL	12,8
			Jumlah dokumen database SDA darat	1	5 ^{K)}	Survei dan Pemetaan Nasional	BAKOSURTANAL	12,8
c	Pembangunan Infrastruktur Data Spasial	Rancangan rumusan kebijakan teknis, rencana dan program di bidang pembangunan Infrastruktur Data Spasial	Jumlah simpul jaringan di pusat	14	14 ^{K)}	Survei dan Pemetaan Nasional	BAKOSURTANAL	0,8
			Jumlah simpul jaringan di provinsi	6	28 ^{K)}	Survei dan Pemetaan Nasional	BAKOSURTANAL	4,8
			Jumlah simpul jaringan di kabupaten/kota	50	480 ^{K)}	Survei dan Pemetaan Nasional	BAKOSURTANAL	16,4
			Jumlah pembangunan dan pengembangan penghubung simpul	1	5 ^{K)}	Survei dan Pemetaan Nasional	BAKOSURTANAL	36,1
			Jumlah dokumen pembangunan dan pengembangan IDSN	1	5 ^{K)}	Survei dan Pemetaan Nasional	BAKOSURTANAL	795,3
			Jumlah dokumen kegiatan promosi, humas, administrasi kerjasama dan publikasi surta	4	20 ^{K)}	Survei dan Pemetaan Nasional	BAKOSURTANAL	15,9
IV	Peningkatan SDM di bidang survei dan pemetaan	Tersedianya sumber daya manusia yang cukup baik dari sisi kuantitas dan kualitas untuk mendukung kegiatan survei dan pemetaan nasional	Jumlah tenaga terampil (bersertifikat) di bidang survei dan pemetaan	210	1590 ^{K)}			41,0
			Penyusunan kurikulum dan silabus nasional bagi pelatihan dan sertifikasi tenaga terampil survei dan pemetaan	5	34 ^{K)}			

BIDANG PEMBANGUNAN : WILAYAH DAN TATA RUANG
PRIORITAS BIDANG : Pembangunan Data dan Informasi Spasial

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010 - 2014 (Rp. Miliar)
				2010	2014			
			Dokumen Strategi Nasional bagi pengembangan dan pengelolaan sumberdaya manusia bidang survei dan pemetaan	0	2 ^{K)}			
a	Pembangunan Infrastruktur Data Spasial	Rancangan rumusan kebijakan teknis, rencana dan program di bidang pembangunan Infrastruktur Data Spasial	Jumlah tenaga terampil melalui Diklat Teknis Surta	70	430 ^{K)}	Survei dan Pemetaan Nasional	BAKOSURTANAL	2,9
			Jumlah tenaga terampil melalui Diklat Fungsional Surveior Pemetaan	140	1160 ^{K)}	Survei dan Pemetaan Nasional	BAKOSURTANAL	4,6
			Jumlah Dokumen NSPK tentang Pedoman, Standardisasi Kurikulum dan Silabus Diklat Surta	5	34 ^{K)}	Survei dan Pemetaan Nasional	BAKOSURTANAL	1,8
			Jumlah kegiatan peningkatan Kapabilitas Personil, Infrastruktur dan Administrasi Kediklatan	5	30 ^{K)}	Survei dan Pemetaan Nasional	BAKOSURTANAL	6,7
			Jumlah rasio jumlah penelitian per peneliti	1:03	1:02	Survei dan Pemetaan Nasional	BAKOSURTANAL	15,9
			Jumlah dokumen penegakan Sertifikasi SDM surta non-PNS dan fungsionalisasi SDM surta PNS	0	2 ^{K)}	Survei dan Pemetaan Nasional	BAKOSURTANAL	9,1
TOTAL								2,049,0

Keterangan :

^{K)} Angka kumulatif 5 tahun (2010-2014)

BIDANG PEMBANGUNAN : WILAYAH DAN TATA RUANG
PRIORITAS BIDANG : Penyelenggaraan Penataan Ruang

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010 - 2014 (Rp. Miliar)
				2010	2014			
I	Penyelesaian Peraturan Perundangan sesuai amanat Undang-Undang Penataan Ruang	Tersedianya aturan perundangan sesuai Amanat UU 26/2007	Menurunnya (Jumlah) konflik pemanfaatan ruang					331,74
a	Penyiapan dan Penetapan Materi Peraturan Perundangan-undangan dan NSPK Bidang	Tersusunnya PP Sesuai Amanat UU 26/2007, yaitu: <ul style="list-style-type: none"> · PP tentang Penyelenggaraan Pembinaan Penataan Ruang · PP tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (termasuk di dalamnya adalah PP tentang Kriteria dan Tata Cara Peninjauan Kembali RTRW · PP tentang Zonasi Sistem Nasional · PP tentang Prosedur Perolehan Izin Pemanfaatan Ruang Dan Tata Cara Penggantian Yang Layak · PP tentang Insentif dan Disinsentif · PP tentang Pengendalian Pemanfaatan Ruang · PP tentang Kriteria Kawasan Perkotaan 	Meningkatnya (Presentase) Penyelesaian PP Sesuai Amanat UU 26/2007	8 NSPK	60 NSPK ^{K)}	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Kementerian PU	96,0

BIDANG PEMBANGUNAN : WILAYAH DAN TATA RUANG
PRIORITAS BIDANG : Penyelenggaraan Penataan Ruang

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010 - 2014 (Rp. Miliar)
				2010	2014			
		<ul style="list-style-type: none"> · PP tentang Penataan Kawasan Perkotaan · PP tentang Penataan Kawasan Agropolitan · PP tentang Penataan Ruang Kawasan Perdesaan · PP tentang Sanksi Administratif 						
b	Peningkatan dan Fasilitasi Penataan Ruang Daerah dan Lingkungan Hidup di Daerah	Tersusunnya PP Sesuai Amanat UU 26/2007	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah PP tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat. Jumlah Penyusunan NSPM Penataan Ruang Daerah. 	1 PP	1 PP ^{ki}	Program Bina Pembangunan Daerah	Kemendagri	5,6
c	Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Nasional Termasuk Melakukan Koordinasi dan Fasilitasi Proses Penetapan Dokumen-dokumen yang Dihasilkan	Tersusunnya Perpres Sesuai Amanat UU 26/2007: <ul style="list-style-type: none"> · Perpres RTR Pulau · Perpres RTR KSN 	Meningkatnya Penyelesaian Perpres sesuai Amanat UU 26/2007	4 RTR Pulau dan 4 Perpres KSN	7 RTR Pulau dan 69 Perpres KSN ^{ki}	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Kementerian PU	204,5
d	Fasilitasi Penyusunan Substansi Raperda RTRW dan Rencana Rincinya	Tersusunnya Perda Sesuai Amanat UU 26/2007: <ul style="list-style-type: none"> · Perda mengenai RTRW Provinsi · Perda mengenai RTRW Kabupaten 	Meningkatnya Penyelesaian Perda Provinsi dan Kabupaten Amanat UU 26/2007	4 keg	11 kegiatan ^{ki}	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Kementerian PU	11,4

BIDANG PEMBANGUNAN : WILAYAH DAN TATA RUANG
PRIORITAS BIDANG : Penyelenggaraan Penataan Ruang

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010 - 2014 (Rp. Miliar)
				2010	2014			
e	Peningkatan dan Fasilitasi Penataan Ruang Daerah dan Lingkungan Hidup di Daerah	Tersusunnya Perda Sesuai Amanat UU 26/2007 dan Undang-Undang 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah	Meningkatnya (Persentase) Penyelesaian Perda Sesuai Amanat UU 26/2007 dan Undang-Undang 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.	30% daerah	100%	Program Bina Pembangunan Daerah	Kemendagri	14,3
		Bantuan Penyusunan Rencana Tata Ruang Daerah Pemekaran.	Jumlah RTR Daerah Pemekaran yang sudah disempurnakan.	2 daerah	14 daerah ^{*)}			
II	Peningkatan Kualitas Produk Rencana Tata Ruang	Meningkatnya kualitas produk rencana tata ruang	Menurunnya (Jumlah) konflik pemanfaatan ruang					327,8
a	Pemetaan Dasar Rupabumi dan Tata Ruang	Tersusunnya kebijakan pemetaan dasar rupabumi dan meningkatnya jumlah cakupan peta rupabumi Indonesia	Jumlah Nomor Lembar Peta (NLP) Peta Rupabumi skala 1:10.000 (Sumatera & selatan Jawa)	90		Program Survei dan Pemetaan Nasional	Bakosurtanal	
		Jumlah NLP Peta Rupabumi skala 1:50.000 wilayah gap	160					
		Jumlah NLP Peta upabumi skala 1:250.000 wilayah gap	-					
		Jumlah NLP Bsis Data Geospasial skala :10.000 (Sumatera & selatan Jawa),1:50.000 dan 1:250.000	250					
		Jumlah Dokumen Norma Spesifikasi Pedoman Kriteria (NSPK)	5					
		Jumlah dokumen pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan Pemetaan Dasar Rupabumi dan Tata Ruang	5					
		Jumlah NLP gasetir dan model penataan ruang provinsi	400					

BIDANG PEMBANGUNAN : WILAYAH DAN TATA RUANG
PRIORITAS BIDANG : Penyelenggaraan Penataan Ruang

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010 - 2014 (Rp. Miliar)
				2010	2014			
b	Peningkatan kualitas hasil penyelenggaraan penataan ruang	Terlaksananya bantek dan bintek penataan ruang di pusat dan daerah	Jumlah kegiatan stock taking tata ruang provinsi	0	18 kegiatan ^{k)}	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Kementerian PU	15,0
			Jumlah kabupaten yang mendapatkan bantek peningkatan pelaksanaan penataan ruang kabupaten pemenang PKPD	3 kab	15 kab ^{k)}			18,8
			Jumlah kabupaten yang mendapatkan bimbingan teknis penataan ruang wilayah kabupaten	44 kab	220 kab ^{k)}			103,2
			Jumlah kabupaten yang mendapatkan bimbingan teknis pengembangan wilayah/kawasan perdesaan dan agropolitan	1 kawasan	28 kawasan ^{k)}			24,3
			Jumlah kegiatan bimbingan teknis pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi	6 keg	22 keg ^{k)}			21,9
			Jumlah kawasan andalan/koridor yang mendapatkan arahan pengembangan wilayah lintas provinsi	1 kawasan	15 kawasan ^{k)}			15,0
			Jumlah wilayah sungai yang mendapatkan fasilitasi penataan ruang lintas wilayah	6 ws	69 ws ^{k)}			85,7
			c	Pengembangan Kapasitas dan Pelembagaan Penyelenggaraan Penataan Ruang	Meningkatnya SDM Penataan ruang yang berkualitas			Jumlah kegiatan pelatihan bidang penataan ruang yang dilaksanakan

BIDANG PEMBANGUNAN : WILAYAH DAN TATA RUANG
PRIORITAS BIDANG : Penyelenggaraan Penataan Ruang

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010 - 2014 (Rp. Miliar)
				2010	2014			
III	Sinkronisasi program pembangunan sesuai dengan rencana tata ruang	Sinkronnya rencana tata ruang dengan rencana pembangunan dan antar rencana tata ruang	Jumlah rencana tata ruang yang sinkron dan jumlah konflik yang terselesaikan					745,1
a	Perencanaan, Pemanfaatan, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Nasional termasuk Melakukan Koordinasi dan Fasilitasi Proses Penetapan Dokumen-dokumen yang dihasilkan	Keserasian dan keselarasan program pembangunan yaitu program dalam RTRWN, RTR Pulau, RTR KSN, RTR PKN, PKSN	Jumlah rencana tata ruang yang telah disinkronkan program pembangunannya	33 provinsi	33 provinsi	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Kementerian PU	720,2
b	Perumusan sinkronisasi UU Penataan Ruang dan UU sektoral terkait	Keserasian dan keselarasan antar UU	Jumlah kegiatan sinkronisasi UU	2 kegiatan	4 kegiatan ^{k)}	Program Koordinasi Pengembangan Urusan Penataan Ruang dan Pengembangan Wilayah	Menko Perekonomian	4,0
c	Peningkatan dan Fasilitasi Penataan Ruang Daerah dan Lingkungan Hidup di Daerah	Meningkatnya keterpaduan dalam penataan ruang Meningkatnya Pemahaman Aparat Daerah dalam Penataan Ruang. Monitoring dan Evaluasi kinerja penyelenggaraan penataan ruang di Daerah.	Jumlah BKPRD yang terbentuk. Terselenggaranya Rakernas BKPRN. Terselenggaranya Raker BKPRD. Terselenggaranya Peningkatan SDM dalam Penataan Ruang (Pemda, BKPRD dan DPRD). Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Penataan Ruang. Jumlah kegiatan evaluasi kinerja penyelenggaraan penataan ruang.	30% daerah - 2 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan	90% 2 kegiatan ^{k)} 6 kegiatan ^{k)} 5 kegiatan ^{k)} 5 ^{k)} 5 ^{k)}	Program Bina Pembangunan Daerah	Kemendagri	21,0
IV	Peningkatan kesesuaian pemanfaatan lahan dengan rencana tata ruang	Meningkatnya efisiensi dan efektifitas program pemanfaatan ruang	Persentase kesesuaian pemanfaatan lahan					78,5

BIDANG PEMBANGUNAN : WILAYAH DAN TATA RUANG
PRIORITAS BIDANG : Penyelenggaraan Penataan Ruang

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010 - 2014 (Rp. Miliar)
				2010	2014			
a	Kegiatan penyusunan rencana pembangunan kewilayahan (pembangunan daerah berdasarkan kewilayahan/lintas wilayah) di bidang tata ruang dan pertanahan	Tersusunnya kebijakan insentif PR: <ul style="list-style-type: none"> • Pajak • Kompensasi • Subsidi silang • Imbalan • Sewa ruang • Urun saham Tersusunnya program disinsentif PR: <ul style="list-style-type: none"> • Pajak • Infrastruktur • Kompensasi • Penalti 	Jumlah laporan kegiatan pelaksanaan insentif dan disinsentif pelaksanaan penataan ruang di daerah	1 laporan	5 laporan ^{K)}	Program Perencanaan Pembangunan Nasional	Bappenas	4,0
b	Pembinaan PPNS bidang Penataan Ruang	Terbinanya PPNS bidang penataan ruang	Jumlah (orang) PPNS yang dibina	90 orang	500 orang ^{K)}	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Kementerian PU	32,5
c	Perumusan Kebijakan, Program dan Anggaran, Kerjasama Luar Negeri serta Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Kegiatan	Laporan kinerja penyelenggaraan penataan ruang di pusat dan daerah	Jumlah kegiatan evaluasi kinerja penyelenggaraan penataan ruang	7 kegiatan	40 kegiatan ^{K)}	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Kementerian PU	42,0
TOTAL								1.483,2

Keterangan :

^{K)} Angka kumulatif 5 tahun (2010-2014)

BIDANG PEMBANGUNAN : WILAYAH DAN TATA RUANG
PRIORITAS BIDANG : Reforma Agraria

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010 - 2014 (Rp. Miliar)
				2010	2014*			
I	Fokus 1: Peningkatan Jaminan Kepastian Hukum Hak Masyarakat Atas Tanah	Meningkatnya jaminan kepastian hukum hak atas tanah	Luas tanah yang memiliki kepastian hukum hak atas tanah					2.816,1
a	Pengelolaan Pertanahan Provinsi	Terwujudnya pengembangan infrastruktur pertanahan secara nasional, regional dan sektoral, yang diperlukan di seluruh Indonesia	Cakupan peta pertanahan (Prioritas Nasional 7)	2.100.000 ha	10.500.000 ha (K)	Pengelolaan Pertanahan Nasional	BPN	228,3
		Terlaksananya percepatan legalisasi aset pertanahan, ketertiban administrasi pertanahan dan kelengkapan informasi legalitas aset tanah	Jumlah bidang tanah yang dilegalisasi (Prioritas Nasional 7)	326.237 bidang	4.063.430 bidang (K)	Pengelolaan Pertanahan Nasional	BPN	2.229,9
b	Pengukuran Dasar (Prioritas Bidang)	Bertambahnya luas wilayah yang telah diukur di dalam sistem referensi sesuai standar	Luas wilayah Indonesia yang telah terukur di dalam sistem referensi sesuai standar	20%	100%	Pengelolaan Pertanahan Nasional	BPN	65,4
c	Pemetaan Dasar (Prioritas Bidang)	Terlaksananya survei dan pemetaan dasar sesuai Standar Operasi dan Prosedur (SOP)	Jumlah peta dasar pertanahan yang dibuat sesuai standar	20%	100%	Pengelolaan Pertanahan Nasional	BPN	58,6
d	Pengaturan dan Penetapan Hak tanah (Prioritas Bidang)	Tersedianya rumusan kebijakan teknis dibidang pengaturan dan penetapan hak tanah serta meningkatnya pelaksanaan penetapan dan perizinan hak tanah.	Jumlah penetapan dan perizinan hak atas tanah (SK)	20%	100%	Pengelolaan Pertanahan Nasional	BPN	9,1
e	Peningkatan Kualitas Pengukuran, Pemetaan, dan Informasi Bidang Tanah, Ruang dan Perairan (Prioritas Bidang)	Terlaksananya pengukuran, pemetaan dan informasi bidang tanah, ruang dan perairan yang berkualitas.	Jumlah penetapan batas dan pembangunan sistem informasi atas HGU, HGB, HPL dan HP	20%	100%	Pengelolaan Pertanahan Nasional	BPN	170,3
f	Peningkatan Pendaftaran Hak Tanah dan Guna Ruang (Prioritas Bidang)	Terwujudnya pembinaan dan pengelolaan pendaftaran hak atas tanah, hak milik atas satuan rumah susun, tanah wakaf, guna ruang dan perairan, serta PPAT	Pembinaan dan pengelolaan hak atas tanah dan guna ruang	20%	100%	Pengelolaan Pertanahan Nasional	BPN	54,4

BIDANG PEMBANGUNAN : WILAYAH DAN TATA RUANG
PRIORITAS BIDANG : Reforma Agraria

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010 - 2014 (Rp. Miliar)
				2010	2014*			
II	Fokus 2: Pengaturan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah (P4T) termasuk pengurangan tanah terlantar	Berkurangnya konsentrasi penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah (P4T)	Terlaksananya redistribusi tanah					1.654,4
a	Pengelolaan Pertanahan Propinsi	Terlaksananya pengaturan dan penataan penguasaan dan pemilikan tanah serta pemanfaatan dan penggunaan tanah secara optimal.	Neraca Penatagunaan Tanah di daerah (Prioritas Nasional 6)	100 kab/kota	500 kab/kota (K)	Pengelolaan Pertanahan Nasional	BPN	54,9
			Inventarisasi P4T (Prioritas Nasional 6)	335.665 bidang	1.678.325 bidang (K)	Pengelolaan Pertanahan Nasional	BPN	366,3
		Terlaksananya redistribusi tanah	Jumlah bidang tanah yang telah didistribusi (Prioritas Nasional 4)	210.000 Bidang	1.050.000 Bidang (K)	Pengelolaan Pertanahan Nasional	BPN	912,7
		Terwujudnya pengendalian penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah, dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka peningkatan akses terhadap sumber ekonomi	Inventarisasi dan identifikasi tanah terindikasi terlantar (Prioritas Nasional 8)	75.900 ha	379.500 ha (K)	Pengelolaan Pertanahan Nasional	BPN	36,3
		Data hasil inventarisasi Wilayah Pesisir, Pulau-Pulau Kecil, Perbatasan dan Wilayah Tertentu (WP3WT)	Inventarisasi Wilayah Pesisir, Pulau-Pulau Kecil, Perbatasan dan Wilayah Tertentu (WP3WT) (Prioritas Nasional 10)	200 SP	885 SP (K)	Pengelolaan Pertanahan Nasional	BPN	98,8
b	Pengelolaan Wilayah Pesisir, Pulau-Pulau Kecil, Perbatasan dan Wilayah Tertentu (WP3WT) (di pusat)	Data hasil inventarisasi Wilayah Pesisir, Pulau-Pulau Kecil, Perbatasan dan Wilayah Tertentu (WP3WT)	Inventarisasi Wilayah Pesisir, Pulau-Pulau Kecil, Perbatasan dan Wilayah Tertentu (WP3WT) (Prioritas Nasional 10)	1 Paket	5 Paket (K)	Pengelolaan Pertanahan Nasional	BPN	29,6
c	Pengelolaan Landreform (Prioritas Bidang)	Meningkatnya jumlah tanah negara yang ditegaskan menjadi Tanah Obyek Landreform (TOL) dan atau yang dikeluarkan dari TOL	Jumlah tanah negara yang ditegaskan menjadi Tanah Obyek Landreform (TOL) dan atau yang dikeluarkan dari TOL	20%	100%	Pengelolaan Pertanahan Nasional	BPN	36,6

BIDANG PEMBANGUNAN : WILAYAH DAN TATA RUANG
PRIORITAS BIDANG : Reforma Agraria

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010 - 2014 (Rp. Miliar)
				2010	2014*			
d	Pengembangan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Penatagunaan Tanah (Prioritas Bidang)	Bertambahnya jumlah kabupaten/kota yg telah memiliki neraca penatagunaan tanah dan mengidentifikasi ketersediaan tanah untuk pembangunan	Jumlah kab/kota yang telah menyusun neraca penatagunaan tanah & mengidentifikasi ketersediaan tanah untuk pembangunan	20%	100%	Pengelolaan Pertanahan Nasional	BPN	51,0
e	Pengelolaan Tanah Negara, Tanah Terlantar dan Tanah Kritis (Prioritas Bidang)	Terselenggaranya pengelolaan tanah negara, tanah terlantar dan kritis	Jumlah analisa ketersediaan tanah untuk kepentingan masyarakat, pemerintah, dan badan usaha	20%	100%	Pengelolaan Pertanahan Nasional	BPN	10,8
f	Pengelolaan Konsolidasi Tanah (Prioritas Bidang)	Meningkatnya jumlah bidang tanah yang dikonsolidasikan	Jumlah obyek potensi konsolidasi tanah	20%	100%	Pengelolaan Pertanahan Nasional	BPN	26,6
g	Pengendalian Pertanahan (Prioritas Bidang)	Menurunnya luas tanah yang terindikasi terlantar	Luas tanah yang terindikasi terlantar	20%	100%	Pengelolaan Pertanahan Nasional	BPN	20,0
h	Pemberdayaan Masyarakat Dan Kelembagaan Dalam Pengelolaan Pertanahan (Prioritas Bidang)	Terselenggaranya akses masyarakat dan lembaga terhadap penguatan hak atas tanah, dan sumber permodalan dan produksi	Akses masyarakat dan lembaga terhadap penguatan hak atas tanah	20%	100%	Pengelolaan Pertanahan Nasional	BPN	10,8
III	Fokus 3: Peningkatan Kinerja Pelayanan Pertanahan	Terselenggaranya pelayanan yang transparan dan akuntabel	Tersedianya prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur (SPOPP)					581,8
a	Pengelolaan Data dan Informasi Pertanahan	Tersedianya data dan informasi pertanahan yang terintegrasi secara nasional dalam rangka pengembangan (Sistem Informasi Manajemen Pertanahan Nasional / SIMTANAS)	Peningkatan akses layanan pertanahan melalui Larasita (Prioritas Nasional 7)	156 kab/kota	419 kab/kota	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis	BPN	254,3
b	Pembinaan Organisasi Dan Pengelolaan Kepegawaian BPN (Prioritas Bidang)	Terselenggaranya penataan organisasi dan layanan kepegawaian	Tersedianya konsep kelembagaan serta prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur (SPOPP)	1 paket	5 paket (K)	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis	BPN	39,1
c	Dukungan Manajemen & Pelaksanaan Tugas Pendidikan STPN	Tersedianya sumberdaya manusia lulusan program Diploma, Pendidikan khusus, spesialis, S1, S2	Jumlah lulusan program Diploma, Pendidikan khusus, spesialis, S1, S2	20%	100%	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis	BPN	12,1

BIDANG PEMBANGUNAN : WILAYAH DAN TATA RUANG
PRIORITAS BIDANG : Reforma Agraria

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010 - 2014 (Rp. Miliar)
				2010	2014*			
d	Pendidikan dan pelatihan bidang pertanahan (Prioritas Bidang)	Terselenggaranya layanan pertanahan yang profesional	Jumlah SDM yang telah mengikuti pelatihan dan pendidikan	2.630 orang	14.150 orang (K)	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis	BPN	47,1
e	Pengelolaan Sarana dan Prasarana (pusat) (prioritas bidang)	Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana BPN RI	Pengembangan sarana prasarana pelayanan pertanahan	-	1 satker (K)	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Aparatur BPN RI	BPN	3,5
f	Pengelolaan Sarana dan Prasarana (daerah) (prioritas bidang)	Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana Kanwil BPN Provinsi	Pengembangan sarana prasarana pelayanan pertanahan	25 satker	325 satker (K)	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Aparatur BPN RI	BPN	519,1
IV	Fokus 4: Penataan dan Penegakan Hukum Pertanahan serta Pengurangan Potensi Sengketa Tanah	Tersedianya peraturan perundang-undangan yang dibutuhkan untuk kepastian hukum pertanahan	Jumlah rancangan peraturan perundang-undangan bidang pertanahan yang selesai disusun					260,2
a	Pengembangan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Pertanahan dan Hubungan Masyarakat (Prioritas Nasional dan Prioritas Bidang)	Terlaksananya pengembangan peraturan perundangan bidang pertanahan dan Hubungan Masyarakat	Jumlah paket rancangan peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang pertanahan dalam rangka mendukung pelaksanaan Undang-undang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Prioritas Nasional 5)	1 paket	5 paket (K)	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis	BPN	19,3
		Tersusunnya peraturan perundangan pengadaan tanah untuk kepentingan umum (Prioritas Nasional 6)	1 paket	5 paket (K)	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis	BPN	10,4	
b	Pengelolaan Pertanahan Provinsi	Berkurangnya sengketa, konflik dan perkara pertanahan serta mencegah timbulnya sengketa, konflik dan perkara pertanahan	Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan (Prioritas Nasional 7)	2.791 kasus	13.955 kasus (K)	Pengelolaan Pertanahan Nasional	BPN	108,0
c	Survey Potensi Tanah (Prioritas Bidang)	Tersedianya Peta Nilai Potensi Tanah Sesuai Standar Operasi dan Prosedur (SOP) sebagai referensi dan indikator ekonomi tanah untuk keadilan dan kesejahteraan rakyat	Peta dan informasi potensi nilai tanah dan kawasan	20%	100%	Pengelolaan Pertanahan Nasional	BPN	67,3

BIDANG PEMBANGUNAN : WILAYAH DAN TATA RUANG
PRIORITAS BIDANG : Reforma Agraria

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010 - 2014 (Rp. Miliar)
				2010	2014*			
d	Pengaturan dan pengadaan tanah dan legalisasi tanah instansi pemerintah, dan BUMN/ BUMD (Prioritas Bidang)	Terlaksananya pengaturan pengadaan tanah pemerintah, penetapan hak atas tanah dan hak pengelolaan instansi pemerintah & BUMN/BUMD	Jumlah penetapan hak atas tanah dan hak pengelolaan	20%	100%	Pengelolaan Pertanahan Nasional	BPN	12,2
e	Pengkajian, Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Pertanahan (Prioritas Bidang)	Berkurangnya jumlah sengketa pertanahan	Jumlah penyelesaian sengketa tanah	20%	100%	Pengelolaan Pertanahan Nasional	BPN	15,8
f	Pengkajian dan Penanganan Konflik Pertanahan (Prioritas Bidang)	Berkurangnya jumlah konflik pertanahan	Jumlah penanganan konflik tanah	20%	100%	Pengelolaan Pertanahan Nasional	BPN	13,6
g	Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pertanahan (Prioritas Bidang)	Terlaksananya penanganan dan penyelesaian perkara pertanahan secara berkualitas	Jumlah perkara yang ditangani dan diselesaikan oleh BPN RI	20%	100%	Pengelolaan Pertanahan Nasional	BPN	13,6
TOTAL								5.312,6

Keterangan :

K) Angka kumulatif 5 tahun (2010-2014)

BIDANG PEMBANGUNAN : WILAYAH DAN TATA RUANG
PRIORITAS BIDANG : Pembangunan Perkotaan

No	Fokus Prioritas/Kegiatan Prioritas	SASARAN (Hasil Outcomes/ Output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
I	Menyiapkan kebijakan pembangunan perkotaan dan meningkatkan sinkronisasi peraturan perundangan terkait pembangunan perkotaan	Terlaksananya penyiapan kebijakan pembangunan perkotaan dan sinkronisasi peraturan perundangan terkait pembangunan perkotaan.	1.Tersusunnya UU Perkotaan 2.Jumlah forum koordinasi pembangunan perkotaan tingkat provinsi 3. Jumlah NSPK bidang Penataan Bangunan dan Lingkungan 3. Jumlah NSPK bidang permukiman 4. Jumlah kajian strategi pengembangan kelembagaan inovasi perencanaan (e-planning), penetapan zonasi kegiatan di kota dan penetapan bank lahan untuk pembangunan di perkotaan					125,5
a	Fasilitasi pembangunan kawasan perkotaan	Tersusunnya UU ttg Perkotaan	Jumlah naskah akademis Jumlah rancangan UU ttg Perkotaan Jumlah uji publik RUU Perkotaan Jumlah UU		1 K) 1 K) 1 K) 1 K)	Program Bina Pembangunan Daerah	Kementerian Dalam Negeri	1,0 1,0 0,5 2,5
		Terbentuknya forum koordinasi	Jumlah pedoman Jumlah forum koordinasi pembangunan perkotaan tingkat provinsi di 5 wilayah pulau besar		1 K) 15 K)			1,0 3,0

BIDANG PEMBANGUNAN : WILAYAH DAN TATA RUANG
PRIORITAS BIDANG : Pembangunan Perkotaan

No	Fokus Prioritas/Kegiatan Prioritas	SASARAN (Hasil Outcomes/ Output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
b	Pengaturan, pembinaan, pengawasan dan penyelenggaraan dalam penataan bangunan dan lingkungan termasuk pengelolaan gedung dan rumah negara	Tersusunnya Rencana Tindak Sistem Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Jumlah kab/kota yang mendapat fasilitasi penyusunan Rencana Tindak Sistem Ruang Terbuka Hijau (RTH)	33	213 ^{k)}	Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Kementerian Pekerjaan Umum	66,0
		Termanfaatkannya produk pengaturan bidang Penataan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah NSPK bidang Penataan Bangunan dan Lingkungan	7	37 ^{k)}			19,0
c	Pengaturan, pembinaan, pengawasan dan penyelenggaraan dalam pengembangan permukiman	Tersusunnya NSPK nasional bidang pengembangan permukiman	Jumlah NSPK nasional bidang permukiman	2	5 ^{k)}			7,0
d	Perencanaan tata ruang serta koordinasi pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang kawasan metropolitan serta pembinaan pelaksanaan pengembangan permukiman	Tersusunnya strategi pengembangan kelembagaan inovasi perencanaan (<i>e-planning</i>), penetapan zonasi kegiatan di kota dan penetapan bank lahan untuk pembangunan di perkotaan	Jumlah kajian strategi pengembangan kelembagaan inovasi perencanaan (<i>e-planning</i>), penetapan zonasi kegiatan di kota dan penetapan bank lahan untuk pembangunan di perkotaan	3	15 ^{k)}	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Kementerian Pekerjaan Umum	24,5
II	Menurunkan tingkat kemiskinan perkotaan	Berkurangnya penduduk miskin di perkotaan	1. Persentase penurunan jumlah penduduk miskin di perkotaan 2. Jumlah kota yang telah memiliki Peraturan Daerah tentang penyediaan perumahan untuk MBR.					5.947,5

BIDANG PEMBANGUNAN : WILAYAH DAN TATA RUANG
PRIORITAS BIDANG : Pembangunan Perkotaan

No	Fokus Prioritas/Kegiatan Prioritas	SASARAN (Hasil Outcomes/ Output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
			3.Tersusunnya pedoman peningkatan peran PKL dan peremajaan kawasan kumuh perkotaan.					
a	Fasilitasi pembangunan kawasan perkotaan	Tersedianya Peraturan Daerah tentang penyediaan perumahan untuk MBR.	Jumlah Peraturan Daerah berkaitan dgn penyediaan perumahan bagi MBR di kawasan perkotaan.		40 ^{K)}	Program Bina Pembangunan Daerah	Kementerian Dalam Negeri	2,0
		Tersusunnya pedoman peningkatan peran PKL dan peremajaan kawasan kumuh perkotaan dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan di perkotaan.	Jumlah kebijakan/pedoman	1 rancangan pedoman	1 ^{K)}			1,0
			Jumlah personil Pemda dan masy yang mengikuti training .		400 ^{K)}			1,5
b	Pengaturan, pembinaan, pengawasan dan penyelenggaraan dalam penataan bangunan dan lingkungan termasuk pengelolaan gedung dan rumah negara	Termanfaatkannya kelurahan/desa dalam pendampingan pemberdayaan masyarakat PNPm-P2KP	Jumlah Kelurahan/Desa yang mendapatkan pendampingan pemberdayaan sosial (P2KP/PNPM)	9.556	20.293 ^{K)}	Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Kementerian Pekerjaan Umum	5.943,0
III	Menurunkan tingkat kerawanan sosial dan kriminalitas di perkotaan	Menurunnya tingkat kerawanan sosial dan kriminalitas di perkotaan	Jumlah kebijakan/pedoman Depdagri terkait dgn pengendalian masalah sosial dan penyakit menular di kawasan perkotaan.					2,6
a	Fasilitasi pembangunan kawasan perkotaan	Tersusunnya kebijakan Depdagri terkait dgn pengendalian masalah sosial dan penyakit menular di kawasan perkotaan.	Jumlah kebijakan/pedoman	1 ranc. pedoman	1 ^{K)}	Program Bina Pembangunan Daerah	Kementerian Dalam Negeri	1,1

BIDANG PEMBANGUNAN : WILAYAH DAN TATA RUANG
PRIORITAS BIDANG : Pembangunan Perkotaan

No	Fokus Prioritas/Kegiatan Prioritas	SASARAN (Hasil Outcomes/ Output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
			Jumlah prov, kab/kota yang mendapat fasilitasi Pemda dalam mengoptimalkan pengendalian masalah sosial dan penyakit menular.		28 provinsi ^{K)} dan 120 kab/kota			1,5
IV	Meningkatkan pemanfaatan modal sosial dan budaya di perkotaan	Meningkatnya pemanfaatan modal sosial dan budaya di perkotaan	<p>1. Tersusunnya pedoman penguatan peran lembaga masyarakat dalam pembangunan perkotaan</p> <p>2. Tersusunnya pedoman pengelolaan bangunan warisan budaya di perkotaan</p> <p>3. Jumlah daerah yang memiliki perda tentang pengelolaan bangunan warisan budaya</p>					6,4
a	Fasilitasi pembangunan kawasan perkotaan	Tersusunnya pedoman dalam rangka penguatan peran lembaga masyarakat perkotaan dalam peran sertanya bagi percepatan pemb.perkotaan.	Jumlah pedoman.	1 rancangan pedoman	1 ^{K)}	Program Bina Pembangunan Daerah	Kementerian Dalam Negeri	1,9
		Tersusunnya pedoman pengelolaan dan pelestarian bangunan warisan budaya di perkotaan	Jumlah kelembagaan masyarakat (LKM) yang difasilitasi		200 ^{K)}			1,5
		Terfasilitasinya pemda dalam penyusunan kebijakan daerah tentang pengelolaan dan pelestarian bangunan warisan budaya	Jumlah naskah akademis	1	1 ^{K)}			0,5
			Jumlah pedoman		1 ^{K)}			1,0
			Jumlah kota yang memiliki perda tentang pengelolaan dan pelestarian bangunan warisan budaya		25 ^{K)}			1,5

BIDANG PEMBANGUNAN : WILAYAH DAN TATA RUANG
PRIORITAS BIDANG : Pembangunan Perkotaan

No	Fokus Prioritas/Kegiatan Prioritas	SASARAN (Hasil Outcomes/ Output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
V	Menguatkan kelembagaan dan kerjasama antar kota	Menguatnya kelembagaan dan kerjasama antar kota	1. Tersusunnya database kawasan perkotaan seluruh Indonesia 2. Tersusunnya pedoman pembentukan lembaga/badan pengelola kawasan perkotaan 3. Jumlah kerjasama <i>sister city</i> dan <i>city sharing</i> 4. Jumlah Badan Kerjasama Kawasan Metropolitan yang terbentuk. 5. Jumlah pedoman pembentukan, batas, fungsi dan luas kawasan perkotaan					63,6
a	Fasilitasi pembangunan kawasan perkotaan	Terbangunnya sistem informasi dan data base perkotaan yang terintegrasi mulai dari kab/kota, provinsi dan pusat.	Jumlah data tipologi kawasan perkotaan seluruh Indonesia.	1	1 K)	Program Bina Pembangunan Daerah	Kementerian Dalam Negeri	1,2
			Jumlah aplikasi data base sistem informasi kawasan perkotaan	1	1 K)			0,8
			Jumlah kab/kota, provinsi yang memiliki data base dan terintegrasi dalam satu sistem informasi kawasan perkotaan		140 K)			14,0
		Terbentuknya lembaga dan badan pengelola kawasan perkotaan	Tersusunnya pedoman pembentukan lembaga/badan pengelola kawasan perkotaan	1 ranc. pedoman	1 K)			1,1

BIDANG PEMBANGUNAN

: WILAYAH DAN TATA RUANG

PRIORITAS BIDANG

: Pembangunan Perkotaan

No	Fokus Prioritas/Kegiatan Prioritas	SASARAN (Hasil Outcomes/ Output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
			Jumlah kota yang difasilitasi dalam untuk penyiapan pola pengelolaan kawasan perkotaan		15 K)			0,9
		Terumuskannya kebijakan Depdagri terkait dengan percepatan pembangunan sanitasi perkotaan	Jumlah kab/kota yang terfasilitasi dalam pembentukan Pokja.	49	365 K)			4,8
			Jumlah kebijakan/pedoman		1 K)			0,8
		Terlaksananya kerjasama city sharing	Jumlah Best Practices Perkotaan Unggulan	4	20 K)			1,3
			Jumlah Kerjasama City Sharing	10	50 K)			1,4
		Terlaksananya kerjasama sister city	Jumlah kerjasama sister city	4	20 K)			0,8
			Jumlah Kerjasama Sister City yang berjalan (terlaksana)	10	50 K)			1,0
		Terlaksananya Kerjasama Pembangunan Perkotaan Kawasan Metropolitan	Jumlah Badan Kerjasama Kawasan Metropolitan yang terbentuk.	1	9 K)			4,1
			Jumlah Rencana Objek Kerjasama yang tersusun scr memadai	2	22 K)			9,0
		Tertatanya batas, fungsi, nama dan luas kawasan perkotaan non otonom	Jumlah pedoman pembentukan, batas, fungsi dan luas kawasan perkotaan	1	1 K)			0,6
			Jumlah supervisi dan fasilitasi pembentukan, batas, fungsi dan luas kawasan perkotaan		80 K)			2,0

BIDANG PEMBANGUNAN : WILAYAH DAN TATA RUANG
PRIORITAS BIDANG : Pembangunan Perkotaan

No	Fokus Prioritas/Kegiatan Prioritas	SASARAN (Hasil Outcomes/ Output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
b	Perencanaan tata ruang serta koordinasi pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang kawasan metropolitan serta pembinaan pelaksanaan pengembangan permukiman	Terselenggaranya penyediaan basis data dan informasi perkotaan	Jumlah pemutakhiran basis data informasi perkotaan	1	5 ^{k)}	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Kementerian Pekerjaan Umum	20,0
VI	Menguatkan kapasitas pemerintah kota dalam perencanaan dan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan perkotaan serta penerapan prinsip tata pemerintahan yang baik	Menguatnya kapasitas pemerintah kota dalam perencanaan dan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan perkotaan serta menguatnya penerapan prinsip tata pemerintahan yang baik	Jumlah kab/kota yang memperoleh pendampingan penyusunan Strategi Pembangunan Permukiman dan dan Infrastruktur Perkotaan (SPPIK)					292,0
a	Pengaturan, pembinaan, pengawasan dan penyelenggaraan dalam pengembangan permukiman	Tersusunnya Strategi Pembangunan Permukiman dan dan Infrastruktur Perkotaan (SPPIK) di daerah	Jumlah kab/kota yang memperoleh pendampingan penyusunan Strategi Pembangunan Permukiman dan dan Infrastruktur Perkotaan (SPPIK)	50	207 ^{k)}	Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Kementerian Pekerjaan Umum	292,0
VII	Meningkatkan penanganan polusi lingkungan dan mitigasi bencana dalam pengelolaan perkotaan	Meningkatnya penanganan polusi lingkungan dan mitigasi bencana secara terpadu dalam pengelolaan perkotaan	1. Jumlah daerah yang terfasilitasi dalam penyusunan Perda tentang pengelolaan lingkungan dan mitigasi bencana					63,5

BIDANG PEMBANGUNAN : WILAYAH DAN TATA RUANG
PRIORITAS BIDANG : Pembangunan Perkotaan

No	Fokus Prioritas/Kegiatan Prioritas	SASARAN (Hasil Outcomes/ Output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
			2. Jumlah kota pusaka, rawan bencana, dan pemenang PKPD yang ditingkatkan kualitas pengembangan perkotaan dan kapasitas kelembagaannya					
a	Fasilitasi pembangunan kawasan perkotaan	Terlaksananya fasilitasi pemda dalam penyusunan perda pengelolaan lingkungan dan mitigasi bencana	Jumlah kota terfasilitasi.		45 ^{k)}	Program Bina Pembangunan Daerah	Kementerian Dalam Negeri	1,5
b	Perencanaan tata ruang serta koordinasi pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang kawasan metropolitan serta pembinaan pelaksanaan pengembangan permukiman	Meningkatnya upaya pengelolaan lingkungan dan mitigasi bencana alam dalam perencanaan dan pelaksanaan rencana pembangunan perkotaan	Jumlah kota pusaka, rawan bencana, dan pemenang PKPD yang ditingkatkan kualitas pengembangan perkotaan dan kapasitas kelembagaannya	3	31 ^{k)}	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Kementerian Pekerjaan Umum	62,0
VIII	Meningkatkan investasi dan pembangunan ekonomi di perkotaan	Meningkatnya investasi dan pembangunan ekonomi di perkotaan	1. Jumlah daerah yang telah menerapkan modernisasi pengelolaan pasar tradisional 2. Persentase pertumbuhan ekonomi (PDRB dan PAD) di perkotaan					3,8
a	Fasilitasi pembangunan kawasan perkotaan	Tersusun dan terlaksananya kebijakan tentang pengelolaan pasar tradisional	Jumlah kebijakan Jumlah kota yang memiliki kebijakan tentang pengelolaan pasar tradisional Jumlah evaluasi kota yang telah menerapkan modernisasi pengelolaan pasar tradisional		1 ^{k)} 15 ^{k)} 10 ^{k)}	Program Bina Pembangunan Daerah	Kementerian Dalam Negeri	0,5 2,3 1,0

BIDANG PEMBANGUNAN : WILAYAH DAN TATA RUANG
PRIORITAS BIDANG : Pembangunan Perkotaan

No	Fokus Prioritas/Kegiatan Prioritas	SASARAN (Hasil Outcomes/ Output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
IX	Menyediakan pelayanan publik sesuai dengan Standar Pelayanan Perkotaan	Tersedianya pelayanan publik sesuai dengan standar pelayanan perkotaan	Persentase terpenuhinya Standar Pelayanan Perkotaan					2.114,0
a	Fasilitasi pembangunan kawasan perkotaan	Tersusunnya Pedoman Standar Pelayanan Perkotaan (kebijakan mengenai jenis-jenis pelayanan yang harus tersedia dalam suatu kawasan perkotaan)	Jumlah kebijakan/pedoman Jumlah prov, kab/kota yang difasilitasi dan disiapkan kebutuhan perencanaan pembangunan perkotaan sesuai SPP	1	1 ^{K)}	Program Bina Pembangunan Daerah	Kementerian Dalam Negeri	0,5 1,5
		Terlaksananya penilaian terhadap daerah yang mengikuti IMP Award	Jumlah penghargaan IMP Jumlah dokumen evaluasi dan penyempurnaan sistem penilaian IMP Award	15	45 ^{K)} 2 ^{K)}			3,1 1,0
		Terfasilitasi dan tersupervisinya penyelenggaraan penyerahan aset PSU dari pengembang ke Pemda	Jumlah Prov, kab/kota yang terfasilitasi dan tersupervisi dalam penyelenggaraan penyerahan aset PSU dari pengembang ke Pemda	5 prov, 10 kab/kota	25 prov, 50 kab/kota ^{K)}			2,0
			Jumlah prov, kab/kota yang terfasilitasi dalam penyusunan Perda terkait PSU di daerah		10 kab/kota dari 3 provinsi			2,0
		Tersusunnya standar pengukuran besaran RTH kawasan perkotaan dan perda terkait RTH di kawasan perkotaan.	Jumlah kebijakan/dokumen Jumlah Kabupaten/kota yang terfasilitasi	1 konsep rancangan dokumen.	1 ^{K)} 28 ^{K)}			2,1 2,8

BIDANG PEMBANGUNAN

: WILAYAH DAN TATA RUANG

PRIORITAS BIDANG

: Pembangunan Perkotaan

No	Fokus Prioritas/Kegiatan Prioritas	SASARAN (Hasil Outcomes/ Output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
b	Pengaturan, pembinaan, pengawasan dan penyelenggaraan dalam penataan bangunan dan lingkungan termasuk pengelolaan gedung dan rumah negara	Meningkatnya kualitas ruang terbuka hijau pada lingkungan permukiman yang setara dengan 369 Ha	Jumlah Kawasan setara 369 Ha yang mendapatkan dukungan sarana dan prasarana Ruang terbuka Hijau	39	207 ^{K)}	Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Kementerian Pekerjaan Umum	562,0
		Meningkatnya jumlah kawasan yang meningkat kualitasnya yang setara dengan 7.380 Ha	Jumlah Kawasan setara 7.380 Ha yang mendapatkan dukungan sarana dan prasarana pada kawasan yang direvitalisasi	32	152 ^{K)}			1.137,0
		Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman tradisional dan bersejarah yang setara dengan 442 Ha	Jumlah kawasan setara 442 Ha yang mendapatkan dukungan sarana dan prasarana pada pemukiman tradisional dan bersejarah	65	160 ^{K)}			400,0
X	Meningkatkan implementasi rencana tata ruang perkotaan dan pengendalian pemanfaatan ruang perkotaan	Meningkatnya implementasi rencana tata ruang perkotaan dan pengendalian pemanfaatan ruang perkotaan	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap rencana pemanfaatan ruang					88,3
a	Fasilitasi pembangunan kawasan	Terlaksananya fasilitasi pemda dalam	Jumlah daerah terfasilitasi.		31 ^{K)}	Program Bina Pembangunan Daerah	Kementerian Dalam Negeri	1,4
			Jumlah daerah yang memiliki perda ttg Pemberian IMB		31 ^{K)}			1,4
		Meningkatnya kinerja pemerintah daerah dalam perencanaan perkotaan dan melaksanakan tertib ruang	Jumlah daerah yg terfasilitasi dalam penyelenggaraan perencanaan di kawasan perkotaan	10	50 ^{K)}			4,9
			Jumlah pedoman koordinasi pengawasan dan pengendalian pembangunan perkotaan		1 ^{K)}			0,5

BIDANG PEMBANGUNAN : WILAYAH DAN TATA RUANG
PRIORITAS BIDANG : Pembangunan Perkotaan

No	Fokus Prioritas/Kegiatan Prioritas	SASARAN (Hasil Outcomes/ Output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
			Jumlah kegiatan koordinasi pengawasan dan pengendalian provinsi (5 wilayah)		15 ^{k)}			4,5
			Jumlah hasil evaluasi kinerja pemda dalam pengawasan dan pengendalian pembangunan perkotaan		3 ^{k)}			1,5
b	Perencanaan tata ruang serta koordinasi pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang kawasan metropolitan serta pembinaan pelaksanaan pengembangan permukiman	Terlaksananya pengembangan perkotaan beserta kapasitas kelembagaannya, terutama kota-kota baru dan kota-kota yang berkembang pesat	Jumlah kota yang memperoleh pembinaan teknis pelaksanaan pengembangan perkotaan dan kapasitas kelembagaannya	18	109 ^{k)}	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Kementerian Pekerjaan Umum	74,1
TOTAL								8.707,1

Keterangan :

^{k)} Angka kumulatif 5 tahun (2010-2014)

BIDANG PEMBANGUNAN : WILAYAH DAN TATA RUANG
PRIORITAS BIDANG : Pembangunan Perdesaan

NO	FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
I	Menguatkan kapasitas dan peran desa dan tata kelola pemerintahan desa yang baik	Menguatnya kapasitas dan peran pemerintahan desa, lembaga-lembaga desa serta kelembagaan masyarakat, dengan menerapkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik	1. Tingkat partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan 2. Pelaksanaan Tata pemerintahan yang baik					498,3
a.	Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan	<ul style="list-style-type: none"> Mewujudkan pemerintahan desa yang demokratis dan efektif dalam rangka pemberian pelayanan kepada masyarakat. Mengembangkan manajemen pemerintahan desa yang efektif, dengan tetap mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai perkembangan masyarakat. 	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah fasilitasi pelayanan administrasi pemerintahan desa dan kelurahan melalui Bintek konsolidasi, inventarisasi serta penyusunan UU tentang Desa. Jumlah fasilitasi pengelolaan keuangan dan aset desa serta kelurahan melalui Bintek, inventarisasi dan pendataan keuangan dan aset desa, pengembangan desa wisata sebagai sumber PAD 	33 Prov 86 Kab 1 Produk Hukum	33 Prov 100 Kab	Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	Kementerian Dalam Negeri, Ditjen Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa	58,0
				15 Provinsi 30 Kabupaten	32 Provinsi 192 Kab			17,6

BIDANG PEMBANGUNAN : WILAYAH DAN TATA RUANG
PRIORITAS BIDANG : Pembangunan Perdesaan

NO	FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
		· Memperkuat kemampuan Perangkat Desa dan anggota Badan Perwakilan Desa, agar mampu menyelenggarakan pemerintahan desa secara demokratis dan efektif.	· Jumlah fasilitasi pengembangan desa dan kelurahan melalui penetapan indikator keberhasilan pemdes, penetapan dan penegasan, pemetaan batas wilayah desa, penyusunan data based desa dan kelurahan, bimtek, dan koordinasi.	8 Provinsi, 10 Kabupaten, 20 Desa	32 Provinsi 64 Kabupaten 128 Desa			40,1
		· Meningkatnya kemampuan Pemerintah Daerah dalam memfasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa.	· Jumlah fasilitasi peningkatan kapasitas aparat desa dan kelurahan	600 Orang dari 32 Provinsi, 18 Kab/Kota	1000 Orang dari 32 Provinsi, 32 Kab/Kota	Bimtek peningkatan kapasitas		22,0
			· Jumlah fasilitasi pematapan Badan Permusyawaratan Desa melalui Bintek, Orientasi, Koordinasi, Monitoring dan evaluasi	15 Provinsi 30 Kabupaten 60 BPD	32 Provinsi 192 Kab 384 BPD			25,7
b.	Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Dan Desa Lingkup Regional	· Meningkatkan kapasitas Aparat dan Masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa.	· Jumlah pelatihan di bidang pemberdayaan aparatur desa/kelurahan sesuai standar	27 Angkt	147 Angkt ^{KS)}	Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	Kementerian Dalam Negeri, Ditjen Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa	58,6
			· Jumlah pelatihan di bidang pemberdayaan lembaga masyarakat desa/kelurahan sesuai standar	30 Angkt	174 Angkt ^{KS)}			84,3

BIDANG PEMBANGUNAN : WILAYAH DAN TATA RUANG
PRIORITAS BIDANG : Pembangunan Perdesaan

NO	FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
			· Biaya rata-rata pelayanan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, administrasi umum, perpustakaan, perlengkapan dan rumah tangga.	100%	100%			61,6
c.	Pengembangan Peran Serta Masyarakat dalam pembangunan transmigrasi	· Meningkatnya peranserta masyarakat dalam pembangunan transmigrasi pada Daerah Tertinggal	· Instansi yang bekerjasama mendukung program transmigrasi	16 lembaga	80 lembaga ^{KJ}	Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Kemen. Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, Ditjen P4T	7,1
			· Kabupaten/Kota yang bersedia melaksanakan pembangunan transmigrasi	96 kab	104 kab			31,5
			· Minat masyarakat untuk mengikuti program transmigrasi	19.600 kel	106.030 kel ^{KJ}			13,0
			· Kesepakatan bersama antar Prov dan Perjanjian KSAD antar Kab/Kota	23 kab	26 kab			6,5
			· Nilai rencana investasi yang akan dikembangkan oleh Badan Usaha	1,4 trilyun	8,8 trilyun ^{KJ}			6,9
		· Meningkatnya peranserta masyarakat dalam pembangunan transmigrasi pada Daerah Perbatasan	· Instansi yang bekerjasama mendukung program transmigrasi	16 lembaga	80 lembaga ^{KJ}	Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Kemen. Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, Ditjen P4T	4,8
			· Kabupaten/Kota yang bersedia melaksanakan pembangunan transmigrasi	96 kab	104 kab			21,0
			· Minat masyarakat untuk mengikuti program transmigrasi	19.600 kel	106.030 kel ^{KJ}			8,6

BIDANG PEMBANGUNAN : WILAYAH DAN TATA RUANG
PRIORITAS BIDANG : Pembangunan Perdesaan

NO	FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/LEMB AGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
			· Kesepakatan bersama antar Prov dan Perjanjian KSAD antar Kab/Kota	23 kab	26 kab			4,3
			· Nilai rencana investasi yang akan dikembangkan oleh Badan Usaha	1,4 trilyun	8,8 trilyun ^{ki)}			0,2
		· Meningkatnya peranserta masyarakat dalam pembangunan transmigrasi pada wilayah strategis	· Instansi yang bekerjasama mendukung program transmigrasi	4 lembaga	20 lembaga ^{ki)}	Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Kemen. Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, Ditjen P4T	2,3
			· Kabupaten/Kota yang bersedia melaksanakan pembangunan transmigrasi	24 kab	26 kab			13,1
			· Minat masyarakat untuk mengikuti program transmigrasi	4.900 kel	26.530 kel ^{ki)}			5,4
			· Kesepakatan bersama antar Prov dan Perjanjian KSAD antar Kab/Kota	6 kab	7 kab			2,7
			· Nilai rencana investasi yang akan dikembangkan oleh Badan Usaha	0,4 trilyun	2,7 trilyun ^{ki)}			2,9

**BIDANG PEMBANGUNAN
PRIORITAS BIDANG**

**: WILAYAH DAN TATA RUANG
: Pembangunan Perdesaan**

NO	FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/LEMB AGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
II.	Meningkatkan kualitas dasar sumber daya manusia perdesaan	Terciptanya peningkatan kualitas dasar masyarakat di kawasan perdesaan	1. Tingkat pendidikan 2. Tingkat harapan hidup 3. Tingkat kualitas hidup masyarakat perdesaan termasuk masyarakat di Kawasan Transmigrasi					612,7
a.	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Masyarakat di Kawasan Transmigrasi	<ul style="list-style-type: none"> · Meningkatnya penguatan kelembagaan perdesaan di permukiman transmigrasi pada Daerah Tertinggal · Meningkatnya kapasitas aparat dalam pengelolaan dan pelayanan bagi masyarakat di kawasan transmigrasi pada Daerah Tertinggal · Meningkatnya kapasitas sumber daya manusia dalam proses pengembangan di kawasan transmigrasi pada Daerah Tertinggal · Meningkatnya peran serta lintas sektor, swasta dan masyarakat di kawasan transmigrasi pada Daerah Tertinggal · Terciptanya peningkatan kualitas dasar masyarakat di Kawasan Transmigrasi pada Daerah Tertinggal 	<ul style="list-style-type: none"> · Jumlah kelembagaan masyarakat yang mandiri · Jumlah aparat yang memiliki kapasitas pengelolaan dan pelayanan di Kawasan Transmigrasi · Jumlah fasilitasi kegiatan yang dilakukan; · Jumlah pelatihan dan pendampingan yang diberikan · Jumlah lintas sector yang berperan · Jumlah swasta / investor · Jumlah masyarakat transmigrasi · Bantuan Pendidikan · Bantuan Kesehatan · Pelayanan Mental spiritual 	<ul style="list-style-type: none"> 10 lembaga 144 kimtrans 12 bln 12 kali 5 LS 9 34.861 Kel 27.925 Kel 36.861 Kel 131 Kel 	<ul style="list-style-type: none"> 127 Lembaga ^{K)} 743 kimtrans ^{K)} 60 bln ^{K)} 60 kali ^{K)} 36 LS ^{K)} 59 ^{K)} 197.550 Kel ^{K)} 165.904 Kel ^{K)} 200.052 Kel ^{K)} 735 Kel ^{K)} 	Pengembangan masyarakat dan kawasan transmigrasi	Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Ditjen P2MKT	<ul style="list-style-type: none"> 19,9 5,7 2,7 2,7 10,3 3,8 15,3 81,6 80,8 69,9

**BIDANG PEMBANGUNAN
PRIORITAS BIDANG**

**: WILAYAH DAN TATA RUANG
: Pembangunan Perdesaan**

NO	FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/LEMB AGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
		- Meningkatnya penguatan kelembagaan perdesaan di permukiman transmigrasi pada Daerah Perbatasan	- Jumlah kelembagaan masyarakat yang mandiri	10 lembaga	28 lembaga ^{K)}			13,2
		- Meningkatnya kapasitas aparat dalam pengelolaan dan pelayanan bagi masyarakat di kawasan transmigrasi pada Daerah Perbatasan	- Jumlah aparat yang memiliki kapasitas pengelolaan dan pelayanan di Kawasan Transmigrasi	26 kimtrans	107 kimtrans ^{K)}			0,9
		- Meningkatnya kapasitas sumber daya manusia dalam proses pengembangan di kawasan transmigrasi pada Daerah Perbatasan	- Jumlah fasilitasi kegiatan yang dilakukan;	12 bln	60 bln ^{K)}			0,4
			- Jumlah pelatihan dan pendampingan yang diberikan	12 bln	60 bln ^{K)}			0,4
		- Meningkatnya peran serta lintas sector, swasta dan masyarakat di kawasan transmigrasi pada Daerah Perbatasan	- Jumlah lintas sector yang berperan	1 LS	33 LS ^{K)}			1,6
			- Jumlah swasta / investor	2	10 ^{K)}			0,5
			- Jumlah masyarakat transmigrasi	41.013 Kel	226.652 Kel ^{K)}			19,2
		- Terciptanya pe-ningkatan kualitas dasar masyarakat di Kawasan Transmigrasi pada Daerah Perbatasan	- Bantuan Pendidikan	4.928 Kel	23.456 Kel ^{K)}			10,8
			- Bantuan Kesehatan	4.152 Kel	26.591 Kel ^{K)}			12,8
			- Pelayanan Mental spiritual	23 Kel	105 Kel ^{K)}			11,8
		- Meningkatnya penguatan kelembagaan perdesaan di permukiman transmigrasi pada Wilayah Strategis	- Jumlah kelembagaan masyarakat yang mandiri	6 lembaga	43 lembaga ^{K)}			5,4

**BIDANG PEMBANGUNAN
PRIORITAS BIDANG**

**: WILAYAH DAN TATA RUANG
: Pembangunan Perdesaan**

NO	FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/LEMB AGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
		· Meningkatnya kapasitas aparat dalam pengelolaan dan pelayanan bagi masyarakat di kawasan transmigrasi pada Wilayah Strategis	· Jumlah aparat yang memiliki kapasitas pengelolaan dan pelayanan di Kawasan Transmigrasi	77 UPT	385 UPT ^{K)}			3,0
		· Meningkatnya kapasitas sumber daya manusia dalam proses pengembangan di kawasan transmigrasi pada Wilayah Strategis	· Jumlah pelatihan dan pendampingan yang diberikan	12 kali	60 kali ^{K)}			2,1
		· Meningkatnya peran serta lintas sektor, swasta dan masyarakat di kawasan transmigrasi pada Wilayah Strategis	· Jumlah lintas sektor yang berperan	6 Ls	43 Ls ^{K)}			5,3
			■ Jumlah swasta / investor	11	69 ^{K)}			1,5
			■ Jumlah masyarakat transmigrasi	10.254 Kel	56.666 Kel ^{K)}			5,0
		■ Terciptanya peningkatan kualitas dasar masyarakat di Kawasan Transmigrasi pada Wilayah Strategis	■ Bantuan Pendidikan	8.214 Kel	47.420 Kel ^{K)}			17,8
			■ Bantuan Kesehatan	10.254 kel	56.666 Kel ^{K)}			18,9
			■ Pelayanan Mental spiritual	35 Kel	207 Kel ^{K)}			20,5
b.	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Dan Pelatihan Masyarakat	■ Pelayanan pengembangan kelembagaan dan pelatihan masyarakat sesuai standar.	■ Jumlah pelatihan yang diberikan bagi masyarakat perdesaan melalui penyusunan kurikulum dan modul, pelatihan, sinkronisasi, TOT;	12 Angkt 480 orang dari 32 Prov	25 Angkt 1000 orang dari 32 Prov	Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	Kementerian Dalam Negeri, Ditjen Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa	27,6
			■ Jumlah fasilitasi pendataan potensi desa melalui Pedataan dan Pendayagunaan Profil Desa/Kelurahan, Penyelenggaraan Lomba Desa/Kelurahan	33 prov, 394 Kab 5 Kelurahan dan 5 Desa	33 prov, 468 Kab 5 Kelurahan dan 5 Desa			56,5

BIDANG PEMBANGUNAN : WILAYAH DAN TATA RUANG
PRIORITAS BIDANG : Pembangunan Perdesaan

NO	FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
			<ul style="list-style-type: none"> Jumlah Program dan Kegiatan masuk desa dan peningkatan system perencanaan partisipatif melalui Sosialisasi, Bimtek, Pelatihan dan Monitoring dan evaluasi. 	12 Kegiatan di 32 Provinsi, 12 Kabupaten	32 Kegiatan di 32 Provinsi, 32 Kabupaten			17,5
			<ul style="list-style-type: none"> Jumlah penataan ruangan kawasan pedesaan melalui fasilitasi Pemda dalam penyusunan perda tentang tata ruang kawasan pedesaan, pengembangan Pusat pertumbuhan antar desa (PPTAD), bimtek, dan koordinasi. 	10 Kab. di 10 Provinsi	50 Kab di 25 Provinsi			41,0
		<ul style="list-style-type: none"> Menata kembali peranan dan fungsi lembaga masyarakat, khususnya Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa Atau Sebutan Lain. 	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah Fasilitasi penataan dan pengembangan lembaga kemasyarakatan di desa melalui Bimtek, pelatihan, pendataan 	33 prov kab 468 12 lkeg	33 prov kab 468 12 lkeg			26,7

BIDANG PEMBANGUNAN : WILAYAH DAN TATA RUANG
PRIORITAS BIDANG : Pembangunan Perdesaan

NO	FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
III.	Meningkatkan keberdayaan masyarakat perdesaan	Menguatnya kapasitas pemerintahan dan masyarakat untuk meningkatkan potensi kelembagaan, modal sosial, dan budaya dalam proses pembangunan	Tingkat kemandirian masyarakat dan kelembagaan					49.231,3
a.	Fasilitasi Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya Masyarakat	· Pelayanan pengembangan pemberdayaan adat dan sosial budaya masyarakat sesuai standar.	· Jumlah fasilitasi kesejahteraan sosial melalui Sosialisasi, Bimtek dan Identifikasi pendataan serta penguatan kelembagaan di daerah. · Jumlah fasilitasi pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (PKK) melalui Penguatan Kelemb. Posyandu, Pendataan Posyandu, peningk. Peran posyandu dlm kesehatan keluarga, pelaks. Bangdesmadu. · Jumlah fasilitasi tenaga kerja perdesaan yang memperoleh pembinaan dan perlindungan keselamatan kerja perdesaan melalui peningkatan kemampuan tenaga kerja pedesaan di wilayah perbatasan antar Negara, penyusunan permendagri, pelatihan dan orientasi.	33 Prov. 15 Kab	33 Prov. 36 Kab	Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	Kementerian Dalam Negeri, Ditjen Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa	68,2
				33 prov 468 kab	33 prov 468 kab			83,5
				33 Prov 50 Kab 7 Keg.	33 Prov 50 Kab 10 Keg.			54,7

BIDANG PEMBANGUNAN : WILAYAH DAN TATA RUANG
PRIORITAS BIDANG : Pembangunan Perdesaan

NO	FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
			· Jumlah pelaksanaan pembinaan budaya nusantara melalui inventarisasi KAT, pelestarian Adat dan Budaya Nusantara dengan pemberian stimulant kepada pemerhati adat dan budaya	15 Kab 13 Keg	50Kab 7 Keg			68,2
			· Jumlah dan fasilitasi pelaksanaan peningkatan pemberdayaan perempuan melalui pendataan, bintek, dan pemberantasan buta aksara;	10 Kab. di 10 Provinsi	50 Kab di 25 Provinsi			53,8
b.	Peningkatan Kemandirian Masyarakat Perdesaan (PNPM-MP)	· Pelayanan percepatan penanganan kemiskinan, pengangguran melalui pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM-MP) sesuai standar.	· Cakupan penerapan PNPM-MP	32 provinsi 4.791 kec, (termasuk 189 kec. Generasi, 80 kec. Perbatasan, dan 33 kab. P2SPP	32 provinsi 2.133 kec, (termasuk 95 kec. Generasi, 85 kec. Perbatasan, dan 351 kab. P2SPP	Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	Kementerian Dalam Negeri, Ditjen Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa	48.782,0
			· Cakupan wilayah kegiatan rekonstruksi dan rehabilitasi pasca bencana, khususnya di Kab. Nias dan Nias Selatan	2 Kab/9 Kec.	2 Kab/9 Kec. ^{K)}			39,8

**BIDANG PEMBANGUNAN
PRIORITAS BIDANG**

**: WILAYAH DAN TATA RUANG
: Pembangunan Perdesaan**

NO	FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/LEMB AGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
c.	Perencanaan Teknis Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi	· Meningkatnya kualitas dan kesesuaian perencanaan teknis pengembangan masyarakat dan kawasan transmigrasi pada Daerah Tertinggal	· Jumlah sosialisasi perencanaan pengembangan masyarakat dan kawasan transmigrasi	7 prov	16 prov	Pengembangan masyarakat dan kawasan transmigrasi	Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Ditjen P2MKT	6,8
			· Rencana Teknis Pembinaan Permukiman Transmigrasi	10 kimtrans	114 kimtrans ^{ki)}			19,2
			· Rencana Teknis Pengembangan Masyarakat di Kawasan Transmigrasi	6 Kws	23 Kws ^{ki)}			15,3
			· Rencana Teknis Pengembangan Kawasan Transmigrasi	5 Kws	23 Kws ^{ki)}			15,7
		· Meningkatnya kualitas dan kesesuaian perencanaan teknis pengembangan masyarakat dan kawasan transmigrasi pada Daerah Perbatasan	· Jumlah sosialisasi perencanaan pengembangan masyarakat dan kawasan transmigrasi	1 prov	10 prov			2,7
			· Rencana Teknis Pembinaan Permukiman Transmigrasi	2 kimtrans	16 kimtrans ^{ki)}			2,5
			· Rencana Teknis pengembangan masyarakat di kawasan transmigrasi	1 Kws	3 Kws ^{ki)}			2,1
			· Rencana Teknis pengembangan kawasan transmigrasi	1 Kws	3 Kws ^{ki)}			2,2
		· Meningkatnya kualitas dan kesesuaian perencanaan teknis pengembangan masyarakat dan kawasan transmigrasi di kawasan transmigrasi pada Wilayah Strategis	· Jumlah sosialisasi perencanaan pengembangan masyarakat dan kawasan transmigrasi	2 kali	10 kali ^{ki)}			1,0
			· Rencana Teknis Pembinaan Permukiman Transmigrasi	3 kimtrans	26 kimtrans ^{ki)}			5,1
			· Rencana Teknis pengembangan masyarakat di kawasan transmigrasi	1 Kws	5 Kws ^{ki)}			4,0
			· Rencana Teknis pengembangan kawasan transmigrasi	2 Kws	6 Kws ^{ki)}			4,6

BIDANG PEMBANGUNAN : WILAYAH DAN TATA RUANG
PRIORITAS BIDANG : Pembangunan Perdesaan

NO	FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
IV.	Meningkatkan ekonomi perdesaan	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat yang dapat dilihat dari menurunnya tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan, distribusi pendapatan yang timpang dan ketidak seimbangan struktural di perdesaan	1. Pertumbuhan ekonomi 2. Peningkatan produksi dan produktivitas hasil pertanian khususnya tanaman pangan 3. Tingkat pengangguran 4. Jumlah penduduk miskin 5. Tingkat kemiskinan					1.209,8
a.	Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Terwujudnya usaha ekonomi masyarakat di perdesaan yang maju, mandiri dan berorientasi pada pemenuhan permintaan pasar, dalam rangka meningkatkan ketahanan ekonomi nasional.	· Jumlah fasilitasi pelaksanaan peningkatan usaha ekonomi keluarga melalui TOT dan pelatihan kewirausahaan, pemberian stimulan kepada kelompok masyarakat pesisir dan penguatan kelembagaan BUMKEL. · Jumlah faasilitasi Pemda dalam pengembangan usaha ekonomi masyarakat tertinggal termasuk PNPM PISEW. · Jumlah fasilitasi pelaksanaan usaha perkreditan dan simpan pinjam dan lembaga keuangan mikro pedesaan melalui Bintek, koordinasi, dan pemberian stimulan kepada kelompok masyarakat,	15 Kab 13 Keg	25 Kab 7 Keg	Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	Kementerian Dalam Negeri, Ditjen Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa	20,1
				33 Prov. 32 Kab	33 Prov. 32 Kab			69,0
				33 Prov 6 Keg.	33 Prov 8 Keg.			33,7

BIDANG PEMBANGUNAN : WILAYAH DAN TATA RUANG
PRIORITAS BIDANG : Pembangunan Perdesaan

NO	FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
			· Prosentase Lembaga Keuangan Mikro Perdesaan/UED-SP yang berfungsi	20%	70%			18,8
			· Jumlah fasilitasi pengembangan dan pengelolaan pasar desa/ pasar lokal dan pengembangan informasi pasar melalui Bintek Pengelolaan Pasar Desa bagi aparat pemerintah Desa, Pengelola Pasar dan BPD, memberikan Stimulan kepada Pasar Desa;	33 Prop 10 Kab, 20 Desa	33 Prop 10 Kab, 60 Desa			50,5
		· Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana perdesaan terutama sarana prasarana pemasaran hasil produksi masyarakat desa	· Jumlah ketersediaan sarana dan prasarana pemasaran hasil produksi masyarakat desa	20 pasar	235 pasar ^{k)}			31,8
b.	Pengembangan Usaha di kawasan transmigrasi	■ Berkembangnya lahan usaha produksi pertanian di permukiman/kawasan transmigrasi pada Daerah Tertinggal	■ jumlah lahan produktif di permukiman/kawa-san transmigrasi	5.654 Ha	23.576 Ha ^{k)}	Pengembangan masyarakat dan kawasan transmigrasi	Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Ditjen P2MKT	218,6
		· Meningkatnya produktivitas desa dalam pengembangan pangan/ komoditas unggulan di kawasan transmigrasi pada Daerah Tertinggal	■ Jumlah produktivitas lahan di permukiman kawasan transmi-grasi.	8.934 Ton	43.384 Ton ^{k)}			

**BIDANG PEMBANGUNAN
PRIORITAS BIDANG**

**: WILAYAH DAN TATA RUANG
: Pembangunan Perdesaan**

NO	FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/LEMB AGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
		· Meningkatnya kemampuan masyarakat dalam penerapan tekno-logi tepat guna dan penyerapan informasi pasar di kawasan transmigrasi pada Daerah Tertinggal	· Jumlah usaha Pengolahan hasil	13 Unit	91 Unit ^{K)}			4,6
			· Jumlah pasar desa	11 bh	94 bh ^{K)}			4,8
			· Jumlah jaringan Pemasaran	11 bh	95 bh ^{K)}			9,6
			· Jumlah kelompok usaha peternakan	-	561 kel ^{K)}			2,8
		· Meningkatnya pembiayaan bagi usaha mikro dan kecil menengah di kawasan transmigrasi pada Daerah Tertinggal	· Jumlah Unit Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA)	1 unit	5 unit ^{K)}			5,0
			· Jumlah bantuan skim kredit mikro di kawasan transmigrasi	1 SKIM	5 SKIM ^{K)}			2,0
			· Jumlah Lembaga ekonomi (koperasi /LKM-BMT Trans di permukiman transmigrasi)	32 unit	279 unit ^{K)}			2,8
		· Meningkatnya penciptaan usaha melalui iklim investasi yang kondusif di kawasan transmigrasi pada Daerah Tertinggal	· jumlah kelompok tani di kawasan Transmigrasi	23 Kel	306 Kel ^{K)}			1,8
			· Jumlah fasilitasi peningkatan iklim investasi kondusif yang menstimulasi peran serta aktif masyarakat dan dunia usaha (swasta) dalam pembangunan perdesaan di kawasan transmigrasi	6 Kws	48 Kws ^{K)}			5,3
			■ Jumlah Skim Kredit untuk investasi	1 SKIM	15 SKIM ^{K)}			12,0

**BIDANG PEMBANGUNAN
PRIORITAS BIDANG**

**: WILAYAH DAN TATA RUANG
: Pembangunan Perdesaan**

NO	FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/LEMB AGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
		<ul style="list-style-type: none"> ■ Peningkatan kemandirian masyarakat dalam pemenuhan pangan baik untuk produksi/keterse-diaan, konsumsi pribadi maupun dijual kembali (pemasaran dan distribusi) di kawasan transmigrasi pada Daerah Tertinggal 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Jumlah bimbingan, pendampingan, dan pelatihan kepada masyarakat dan pengembangan lahan di kawasan transmigrasi 	16 Kws	95 Kws ^{K)}			18,9
		<ul style="list-style-type: none"> ■ Berkembangnya lahan usaha produksi pertanian di permukiman/kawasan transmigrasi pada Daerah Perbatasan 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Jumlah lahan produktif di permukiman/kawa-san transmigrasi 	998 Ha	3.256 Ha ^{K)}			29,5
		<ul style="list-style-type: none"> ■ Meningkatnya produktivitas desa dalam pengembangan pangan/ komoditas unggulan di kawasan transmigrasi pada Daerah Perbatasan 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Jumlah produktivitas lahan di permukiman kawasan transmi-grasi. 	1.577 Ton	5.979 Ton ^{K)}			
		<ul style="list-style-type: none"> ■ Meningkatnya kemampuan masyarakat dalam penerapan tekno-logi tepat guna dan penyerapan informasi pasar di kawasan transmigrasi pada Daerah Perbatasan 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Jumlah usaha Pengolahan hasil 	3 Unit	12 Unit ^{K)}			3,7
			<ul style="list-style-type: none"> ■ Jumlah pasar desa 	2 bh	14 bh ^{K)}			4,2
			<ul style="list-style-type: none"> ■ Jumlah jaringan Pemasaran 	2 bh	14 bh ^{K)}			9,0
			<ul style="list-style-type: none"> ■ Jumlah kelompok usaha peternakan 	-	79 kel ^{K)}			3,2

**BIDANG PEMBANGUNAN
PRIORITAS BIDANG**

**: WILAYAH DAN TATA RUANG
: Pembangunan Perdesaan**

NO	FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/LEMB AGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
		■ Meningkatnya pembiayaan bagi usaha mikro dan kecil menengah di kawasan transmigrasi pada Daerah Perbatasan	■ Jumlah Lembaga ekonomi (koperasi /LKM-BMT Trans di permukiman transmigrasi)	6 Unit	39 unit ^{K)}			0,4
			■ jumlah kelompok tani di kawasan Transmigrasi	5 Kel	42 Kel ^{K)}			0,8
		■ Meningkatnya penciptaan usaha melalui iklim investasi yang kondusif di kawasan transmigrasi pada Daerah Perbatasan	■ Jumlah fasilitasi peningkatan iklim investasi kondusif yang menstimulasi peran serta aktif masyarakat dan dunia usaha (swasta) dalam pembangunan perdesaan di kawasan transmigrasi	2 Kws	12 Kws ^{K)}			2,7
			■ Jumlah Skim Kredit untuk investasi	0 SKIM	4 SKIM ^{K)}			3,2
		■ Peningkatan kemandirian masyarakat dalam pemenuhan pangan baik untuk produksi/keterse-diaan, konsumsi pribadi maupun dijual kembali (pemasaran dan distribusi) di kawasan transmigrasi pada Daerah Perbatasan	■ Jumlah bimbingan, pendampingan, dan pelatihan kepada masyarakat dan pengembangan lahan di kawasan transmigrasi	2 Kws	11 Kws ^{K)}			5,7
		■ Berkembangnya lahan usaha produksi pertanian di permukiman/ kawasan transmigrasi pada Wilayah Strategis	■ Jumlah lahan produktif di permukiman/kawa-san transmigrasi	2.778 Ha	7.792 Ha ^{K)}			52,5

**BIDANG PEMBANGUNAN
PRIORITAS BIDANG**

**: WILAYAH DAN TATA RUANG
: Pembangunan Perdesaan**

NO	FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/LEMB AGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
		<ul style="list-style-type: none"> ■ Meningkatnya produktivitas desa dalam pengembangan pangan/ komoditas unggulan di kawasan transmigrasi pada Wilayah Strategis 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Produktivitas lahan di permukiman/ kawasan transmigrasi 	3.878 Ton	13.666 Ton ^{K)}			
		<ul style="list-style-type: none"> ■ Meningkatnya kemampuan masyarakat dalam penerapan tekno-logi tepat guna dan penyerapan informasi pasar di kawasan transmigrasi pada Wilayah Strategis 	<ul style="list-style-type: none"> ■ jumlah usaha Pengolahan hasil 	4 unit	26 unit ^{K)}			1,3
			<ul style="list-style-type: none"> ■ Jumlah pasar desa 	3 bh	27 bh ^{K)}			1,4
			<ul style="list-style-type: none"> ■ Jumlah jaringan Pemasaran 	3 bh	27 bh ^{K)}			2,7
			<ul style="list-style-type: none"> ■ Jumlah kelompok usaha peternakan 	-	16 kel ^{K)}			0,8
		<ul style="list-style-type: none"> ■ Meningkatnya pembiayaan bagi usaha mikro dan kecil menengah di kawasan transmigrasi pada Wilayah Strategis 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Jumlah bantuan skim kredit mikro di kawasan transmigrasi 	1 Kws	5 Kws ^{K)}			0,5
			<ul style="list-style-type: none"> ■ Jumlah Lembaga ekonomi (koperasi /LKM-BMT Trans di permukiman transmigrasi) 	10 Unit	82 unit ^{K)}			0,8
			<ul style="list-style-type: none"> ■ jumlah kelompok tani di kawasan Transmigrasi 	35 Kel	435 Kel ^{K)}			2,7

**BIDANG PEMBANGUNAN
PRIORITAS BIDANG**

**: WILAYAH DAN TATA RUANG
: Pembangunan Perdesaan**

NO	FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/LEMB AGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
		<ul style="list-style-type: none"> ■ Meningkatnya penciptaan usaha melalui iklim investasi yang kondusif di kawasan transmigrasi pada Wilayah Strategis 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Jumlah fasilitasi peningkatan iklim investasi kondusif yang menstimulasi peran serta aktif masyarakat dan dunia usaha (swas-ta) dalam pemba-ngunan perdesaan termasuk di daerah transmigrasi 	2 Kws	15 Kws ^{K)}			1,5
		<ul style="list-style-type: none"> · Peningkatan kemandirian masyarakat dalam pemenuhan pangan baik untuk produksi/keter-sediaan, konsumsi pribadi maupun dijual kembali (pemasaran dan distribusi) di kawasan transmigrasi pada Wilayah Strategis 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Jumlah bimbingan, pendampingan, dan pelatihan kepada masyarakat dan pengembangan lahan di kawasan transmigrasi 	4 kali	23 kali ^{K)}			4,7

BIDANG PEMBANGUNAN : WILAYAH DAN TATA RUANG
PRIORITAS BIDANG : Pembangunan Perdesaan

NO	FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
c.	Penyediaan Tanah Transmigrasi	■ Tersedianya lahan untuk pembangunan Kawasan Transmigrasi pada Daerah Tertinggal	■ Luas lahan yang tersedia (Ha)	48.000 Ha	240.000 Ha ^{K)}	Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Kemen. Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, Ditjen P4T	3,6
			■ Luas lahan yang didukung oleh legalitas	15.360 Ha	84.316 Ha ^{K)}			29,0
			■ Luas lahan yang dibagikan	7.860 Ha	42.420 Ha ^{K)}			14,5
			■ Data tentang bidang tanah yang dibagikan transmigran	26 lok	137 lok ^{K)}			3,1
			■ Jumlah dan jenis dokumen pertanahan	2 dok	10 dok ^{K)}			13,0
			■ Prosentase penyelesaian kasus pertanahan	15%	20%			29,3
		■ Tersedianya lahan untuk pembangunan Kawasan Transmigrasi pada Daerah Perbatasan	■ Luas lahan yang tersedia (Ha)	32.000 Ha	160.000 Ha ^{K)}	Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Kemen. Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, Ditjen P4T	2,4
			■ Luas lahan yang didukung oleh legalitas	10.240 Ha	55.984 Ha ^{K)}			19,3
			■ Luas lahan yang dibagikan	5.240 Ha	28.280 Ha ^{K)}			9,7
			■ Data tentang bidang tanah yang dibagikan transmigran	17 lok	91 lok ^{K)}			2,1
			■ Jumlah dan jenis dokumen pertanahan	2 dok	10 dok ^{K)}			8,7
			■ Prosentase penyelesaian kasus pertanahan	15%	20%			19,5
		■ Tersedianya lahan untuk pembangunan	■ Luas lahan yang tersedia (Ha)	20.000 Ha	100.000 Ha ^{K)}	Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Kemen. Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, Ditjen P4T	1,5
			■ Luas lahan yang didukung oleh legalitas	6.400 Ha	35.240 Ha ^{K)}			15,9
			■ Luas lahan yang dibagikan	3.226 Ha	17.646 ^{K)}			6,0
			■ Data tentang bidang tanah yang dibagikan transmigran	15 lok	75 Lok ^{K)}			1,3

BIDANG PEMBANGUNAN : WILAYAH DAN TATA RUANG
PRIORITAS BIDANG : Pembangunan Perdesaan

NO	FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
			<ul style="list-style-type: none"> ■ Jumlah dan jenis dokumen pertanahan ■ Prosentase penyelesaian kasus pertanahan 	2 dok	10 dok ^{K)}			5,4
				15%	15%			8,3
d.	Penelitian dan Pengembangan Dukungan Manajemen dan Teknis Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	<ul style="list-style-type: none"> ■ Tersedianya hasil penelitian dan pengembangan Dukungan Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi (Terkait Pembangunan Perdesaan) ■ Tersedianya hasil penelitian dan pengembangan untuk pengembangan masyarakat dan Kawasan Transmigrasi yang dijadikan rekomendasi/ kebijakan (terkait pembangunan Perdesaan) 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Jumlah hasil penelitian dan pengembangan Dukungan Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi yang dijadikan rekomendasi/kebijakan ■ Jumlah hasil penelitian dan pengembangan untuk Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi yang dijadikan rekomendasi/ kebijakan 	15 Keg	95 Keg ^{K)}	Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Balitfo	111,5
				8 Keg	68 Keg ^{K)}			73,8
e.	Pengelolaan data dan informasi permukiman transmigrasi	<ul style="list-style-type: none"> ■ Tersedianya data dan informasi permukiman transmigrasi (terkait pembangunan Perdesaan) ■ Tersedianya data dan informasi kawasan transmigrasi (terkait pembangunan Perdesaan) 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Jumlah data dan informasi permukiman transmigrasi ■ Jumlah data dan informasi kawasan transmigrasi 	7 Keg	35 Keg ^{K)}	Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Balitfo	116,7
				5	25 ^{K)}			71,8

BIDANG PEMBANGUNAN : WILAYAH DAN TATA RUANG
PRIORITAS BIDANG : Pembangunan Perdesaan

NO	FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
V.	Meningkatkan kualitas dan ketersediaan sarana dan prasarana serta penataan ruang perdesaan	Meningkatnya ketersediaan dan kemudahan sarana dan prasarana perdesaan dan RTR perdesaan, termasuk di Kawasan Transmigrasi	1. Tingkat pelayanan dan akses masyarakat terhadap sarpras perdesaan 2. Tersusunnya RTR desa oleh kab/kota					3.181,2
a.	Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	· Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana perdesaan terutama sarana prasarana pemasaran hasil produksi masyarakat desa · Tersusunnya RTR desa oleh Kab/Kota	· Tingkat pelayanan dan akses masyarakat terhadap sarpras perdesaan · Tersusunnya RTR desa oleh kab/kota	-	80 Kab 120 Kab.	Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	Kementerian Dalam Negeri, Ditjen Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa	15,6 25,8
b.	Pengembangan Sarana dan Prasarana	· Meningkatkan fungsi dan ketersediaan sarana prasarana di kawasan transmigrasi pada Daerah Tertinggal · Meningkatkan fungsi dan ketersediaan sarana prasarana di kawasan transmigrasi pada Daerah Perbatasan	· Pengembangan Jalan · Pengembangan Drainase · Pengembangan Sarana Air Bersih · Pengembangan Energi Terbarukan · Pengembangan Bangunan Fasilitas Umum · Revitalisasi Rumah Transmigran · Pengembangan Jalan · Pengembangan Drainase · Pengembangan Sarana Air Bersih	120 Km 14,4 Km 3.150.000 liter - 32 Unit 700 Unit 12 Km 2 Km 787.500 Liter	483,56 Km ^{KJ} 47,84 Km ^{KJ} 13.446.361 liter ^{KJ} 71.200 Watt ^{KJ} 190 Unit ^{KJ} 1.680 Unit ^{KJ} 54 Km ^{KJ} 6,4 K ^{KJ} 2.326.430 Liter ^{KJ}	Pengembangan masyarakat dan	Kementerian Tenaga Kerja dan	226,1 14,3 16,9 10,7 27,7 51,5 28,2 1,8 2,1

BIDANG PEMBANGUNAN : WILAYAH DAN TATA RUANG
PRIORITAS BIDANG : Pembangunan Perdesaan

NO	FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
			- Pengembangan Energi Terbarukan	-	8.152 Watt ^{K)}			1,0
			- Pengembangan Bangunan Fasilitas Umum	29 Unit	48 Unit ^{K)}			3,9
		Meningkatnya fungsi dan ketersediaan sarana prasarana di kawasan transmigrasi pada Wilayah Strategis	- Pengembangan Jalan	30 Km	120,894 Km ^{K)}			53,2
			- Pengembangan Drainase	3,6 Km	11,96 Km ^{K)}			3,6
			- Pengembangan Sarana Air Bersih	787.500 Liter	2.326.430 Liter ^{K)}			4,5
			- Pengembangan Energi Terbarukan	-	17.800 Watt ^{K)}			2,7
			- Pengembangan Bangunan Fasilitas Umum	48 Unit	88 Unit ^{K)}			7,6
c.	Penyusunan Rencana Pembangunan Kawasan Transmigrasi dan Penempatan Transmigrasi	- Tersedianya rencana pembangunan Kawasan Transmigrasi dan rencana penataan persebaran penduduk di Kawasan	- Rencana Wilayah Pengembangan Transmigrasi (WPT) dan Rencana Detail Pusat WPT	3 WPT	18 WPT ^{K)}	Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Kemen. Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, Ditjen P4T	12,9
			- Rencana Kawasan Pengembangan Transmigrasi (SKP)	4 SKP	39 SKP ^{K)}			6,2
			- Rencana Teknis Permukiman/redesain tata ruang perdesaan terintegrasi dengan Kawasan Transmigrasi	13 SP	122 SP ^{K)}			22,1

BIDANG PEMBANGUNAN : WILAYAH DAN TATA RUANG
PRIORITAS BIDANG : Pembangunan Perdesaan

NO	FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
			· Rencana Teknis Sarana dan Prasarana Permukiman Transmigrasi	2 RT SAPRAS	23 RT SARPRAS ^{K)}			2,5
			· Rencana Teknis Pengembangan SDM dan Penataan Persebaran Penduduk di Kawasan Transmigrasi	4 SKP	40 SKP ^{K)}			3,8
			· Rencana Teknis Detail Desain Sarana dan Prasarana Pusat Kawasan Perkotaan Baru	3 DED	20 DED ^{K)}			4,1
			· Data Potensi sasaran pengarah dan perpindahan transmigrasi	12 Kab	12 Kab			2,0
		· Tersedianya rencana pembangunan Kawasan Transmigrasi dan rencana penataan persebaran penduduk di Kawasan	· Rencana Wilayah Pengembangan Transmigrasi (WPT) dan Rencana Detail Pusat WPT	2 WPT	12 WPT ^{K)}			8,6
			· Rencana Kawasan Pengembangan Transmigrasi (SKP)	3 SKP	27 SKP ^{K)}			4,1
			· Rencana Teknis Permukiman/redesain tata ruang perdesaan terintegrasi dengan Kawasan Transmigrasi	9 SP	81 SP ^{K)}			14,8
			· Rencana Teknis Sarana dan Prasarana Permukiman Transmigrasi	1 RT SAPRAS	14 RT SARPRAS ^{K)}			1,6
			· Rencana Teknis Pengembangan SDM dan Penataan Persebaran Penduduk di Kawasan Transmigrasi	3 SKP	28 SKP ^{K)}			2,5

BIDANG PEMBANGUNAN : WILAYAH DAN TATA RUANG
PRIORITAS BIDANG : Pembangunan Perdesaan

NO	FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/LEMB AGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
			- Rencana Teknis Detail Desain Sarana dan Prasarana Pusat Kawasan Perkotaan Baru	2 DED	13 DED ^{K)}			2,7
			- Data Potensi sasaran pengarah dan perpindahan transmigrasi	12 Kab	12 Kab ^{K)}			1,4
		- Tersedianya rencana pembangunan Kawasan Transmigrasi dan rencana penataan persebaran penduduk di Kawasan	- Rencana Wilayah Pengembangan Transmigrasi (WPT) dan Rencana Detail Pusat WPT	1 WPT	7 WPT ^{K)}			5,4
			- Rencana Kawasan Pengembangan Transmigrasi (SKP)	1 SKP	16 SKP ^{K)}			2,6
			- Rencana Teknis Permukiman/redesain tata ruang perdesaan terintegrasi dengan Kawasan Transmigrasi	5 SP	50 SP ^{K)}			9,2
			- Rencana Teknis Sarana dan Prasarana Permukiman Transmigrasi	1 RT SAPRAS	9 RT SARPRAS ^{K)}			1,0
			- Rencana Teknis Pengembangan SDM dan Penataan Persebaran Penduduk di Kawasan Transmigrasi	1 SKP	16 SKP ^{K)}			1,6
			- Rencana Teknis Detail Desain Sarana dan Prasarana Pusat Kawasan Perkotaan Baru	1 DED	7 DED ^{K)}			1,7

**BIDANG PEMBANGUNAN
PRIORITAS BIDANG**

**: WILAYAH DAN TATA RUANG
: Pembangunan Perdesaan**

NO	FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/LEMB AGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
			- Data Potensi sasaran pengarah dan perpindahan transmigrasi	3 Kab	3 Kab			0,8
d.	Pembangunan Permukiman di Kawasan	- Termanfaatkan dan terkelolanya sumberdaya alam dan lingkungan hidup melalui pembangunan Kawasan Transmigrasi dalam bentuk WPT atau LPT yang layak pada Daerah Tertinggal	- Lahan yang dibuka (Ha) - Jalan antar SKP, antar permukiman dan jalan lingkungan permukiman transmigrasi - Rumah Transmigran dan Jamban Keluarga (RTJK) yang dibangun (Unit)	3.571 ha 7,99 km 3.926 unit	28.087 ha ^{KJ} 505,05 km ^{KJ} 24.230 unit ^{KJ}	Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Kemen. Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, Ditjen P4T	106,3 79,6 754,9 70,3 13,8 19,8 187,9 2,2
		- Termanfaatkan dan terkelolanya sumberdaya alam dan lingkungan hidup melalui pembangunan Kawasan Transmigrasi dalam bentuk WPT atau LPT yang layak pada Daerah Perbatasan	- Lahan yang dibuka (Ha) - Jalan antar SKP, antar permukiman dan jalan lingkungan permukiman transmigrasi - Rumah Transmigran dan Jamban Keluarga (RTJK) yang dibangun (Unit)	2.381 ha 5,33 km 2.480 unit	18.725 ha ^{KJ} 336,71 km ^{KJ} 12.964 unit ^{KJ}	Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Kemen. Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, Ditjen P4T	70,9 53,0 503,3

**BIDANG PEMBANGUNAN
PRIORITAS BIDANG**

**: WILAYAH DAN TATA RUANG
: Pembangunan Perdesaan**

NO	FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/LEMB AGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
			- Rumah penduduk setempat yang dipugar/dikembangkan (Unit)	384 unit	2.133 unit ^{K)}			46,9
			- Fasilitas Umum/ Fasilitas Sosial yang dibangun/dikembangkan (Unit)	8 unit	56 unit ^{K)}			9,2
			- Sarana Air Bersih dan Sanitasi yang dibangun (Paket)	608 unit	3.399 unit ^{K)}			13,2
			- Sarana dan Prasarana Kawasan Perkotaan Baru Yang di siapkan	6 SAPRAS	36 SARPRAS ^{K)}			125,3
			- Luas Lahan Siap Bangun di Pusat Kawasan Perkotaan Baru	120 ha	760 ha ^{K)}			1,5
		- Termanfaatkan dan terkelolanya sumberdaya alam dan lingkungan hidup melalui pembangunan Kawasan Transmigrasi dalam bentuk WPT atau LPT yang layak pada Wilayah Strategis	- Lahan yang dibuka (Ha)	3.225,6 ha	15.696,4 Ha ^{K)}	Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Kemen. Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, Ditjen P4T	44,3
			- Jalan antar SKP dalam Kawasan Transmigrasi	0 km	64,2 km ^{K)}			3,8
			- Jalan antar Permu-kiman dalam SKP	0 km	116,8 ^{K)}			4,8
			- Jalan lingkungan dalam Permukiman (Km)	34,68 km	359,12 km ^{K)}			24,5
			- Rumah Transmigran dan Jamban Keluarga (RTJK) yang dibangun (Unit)	1.448 unit	8.038 unit ^{K)}			314,5
			- Rumah penduduk setempat yang dipugar/dikembangkan (Unit)	315 unit	1.653 unit ^{K)}			29,3
			- Fasilitas Umum/ Fasilitas Sosial yang dibangun/dikembangkan (Unit)	5 unit	30 unit ^{K)}			5,7
			- Sarana Air Bersih dan Sanitasi yang dibangun (Paket)	391 unit	3.008 unit ^{K)}			8,4

BIDANG PEMBANGUNAN : WILAYAH DAN TATA RUANG
PRIORITAS BIDANG : Pembangunan Perdesaan

NO	FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
			· Sarana dan Prasarana Kawasan Perkotaan Baru Yang di siapkan	1.898 pkt	11.346 pkt ^{K)}			77,6
			· Luas Lahan Siap Bangun di Pusat Kawasan Perkotaan Baru	30 ha	182 Ha ^{K)}			1,7
VI.	Meningkatkan ketahanan pangan masyarakat perdesaan	Meningkatnya ketersediaan pangan dan lahan pertanian dalam rangka mempercepat pembangunan yang berkelanjutan di perdesaan termasuk di daerah transmigrasi	1. Tingkat harga produk pertanian 2. Jumlah lahan pertanian 3. Tingkat sertifikasi lahan pertanian					629,0
a.	Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	· Pelayanan pengembangan usaha ekonomi masyarakat sesuai standar.	· Jumlah fasilitasi usaha di bidang pertanian dan pangan yang berada di perdesaan melalui Bintek CPPD Provinsi dan Kabupaten/Kota, koordinasi, serta pemberian stimulan kepada kelompok masyarakat pengelola Cadangan Pangan Pemerintah Desa (CPPD).	33 Prov. 15 Kab 6 Keg	33 Prov. 36 Kab 10 Keg	Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	Kementerian Dalam Negeri, Ditjen Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa	20,2
b.	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Masyarakat di Kawasan Transmigrasi	· Terciptanya pe-ningkatan kualitas dasar masyarakat di Kawasan Transmigrasi pada Daerah Tertinggal · Terciptanya pe-ningkatan kualitas dasar masyarakat di Kawasan Transmigrasi pada Daerah Perbatasan	· Bantuan Pangan · Bantuan Pangan	13.876 Kel 2.449 Kel	87.433 Kel ^{K)} 12.718 Kel ^{K)}	Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi	Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Ditjen P2MKT	430,9 50,3

BIDANG PEMBANGUNAN : WILAYAH DAN TATA RUANG
PRIORITAS BIDANG : Pembangunan Perdesaan

NO	FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
		· Terciptanya peningkatan kualitas dasar masyarakat di Kawasan Transmigrasi pada Wilayah Strategis	· Bantuan Pangan	4.082 Kel	24.964 Kel ^{K)}			127,5
VII.	Meningkatkan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang seimbang, berkelanjutan, berwawasan mitigasi bencana	Menurunnya degradasi sumber daya alam dan lingkungan hidup di perdesaan termasuk di kawasan transmigrasi	1. Tingkat kerusakan lingkungan 2. Tingkat pencemaran lingkungan/polusi 3. Keseserasian daya dukung alam dan daya tampung lingkungan dengan persebaran penduduk					1.217,1
a.	Fasilitasi Pengelolaan Sumber Daya Alam Dan Teknologi Tepat Guna	· Pelayanan pengelolaan sumber daya alam dan pendayagunaan teknologi tepat guna sesuai standar.	· Jumlah fasilitasi pelaksanaan pengelolaan konservasi dan rehabilitasi lingkungan perdesaan melalui pelatihan, rakor, supervisi, BLM dan evaluasi dengan kegiatan: (a) pemanfaatan lahan kritis sebagai pilot project DME (b) Pengelolaan Desa Hutan (c) Pengelolaan Hutan Mangrove	14 desa di 13 provinsi	20 desa di 20 provinsi 5 desa, 5 provinsi 2 desa, 2 provinsi	Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	Kementerian Dalam Negeri, Ditjen Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa	40,5

BIDANG PEMBANGUNAN : WILAYAH DAN TATA RUANG
PRIORITAS BIDANG : Pembangunan Perdesaan

NO	FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
			· Jumlah fasilitasi pemberdayaan masyarakat dalam pemanfaatan lahan dan pesisir perdesaan melalui identifikasi, pelatihan, bintek, rakor, BLM, dan monev (termasuk PNP-M-LMP) yang fokus kegiatannya pd penanganan lingkungan perdesaan dan mikro hydro	33 provinsi, 23 kab dan 72 kee,	33 provinsi -			190,7
			Jumlah fasilitasi pembangunan sarana dan prasarana perdesaan melalui orientasi, pelatihan, koordinasi, bintek AMPL (PAMSIMAS).	33 Prov. 32 Kab	33 Prov. 10 Keg.			41,2
			· Jumlah hasil kajian dan pemetaan kebutuhan teknologi perdesaan yang diterapkan termasuk di wilayah perbatasan.	32 provinsi 50 kab. Tertinggal	32 provinsi 50 kab. Tertinggal			48,5
			· Jumlah fasilitasi pemasyarakatan dan kerjasama teknologi tepat guna melalui Pelatihan, Bintek Posyantekdes, BLM, Gelar TTG, Koordinasi, dan Monev	33 Provinsi	33 Provinsi			48,3
				· 35 Kab/Kota	35 Kab/Kota			
				· 4 Pokmas	20 Pokmas ^{KS)}			
				· 20 Posyantekdes	100 ^{KS)}			
				· 8 Usaha Mikro dan Kecil (UMK)	40 UMK ^{KS)}			

**BIDANG PEMBANGUNAN
PRIORITAS BIDANG**

**: WILAYAH DAN TATA RUANG
: Pembangunan Perdesaan**

NO	FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/LEMB AGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
b.	Penyerasian Lingkungan di kawasan transmigrasi	<ul style="list-style-type: none"> ■ Meningkatnya pengelolaan dan pemanfaatan lingkungan dalam mendukung kelestarian fungsi lingkungan hidup di kawasan transmigrasi pada Daerah Tertinggal 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Jumlah dokumen pengelolaan lingkungan hidup di kawasan transmigrasi 	24 Dok	112 Dok ^{K)}	Pengembangan Masyarakat Transmigrasi dan Kawasan Transmigrasi	Kemen. Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, Ditjen P2MKT	22,7
			<ul style="list-style-type: none"> ■ Jumlah mitigasi lingkungan 	13 kimtrans	94 Kimtrans ^{K)}			28,3
			<ul style="list-style-type: none"> ■ Jumlah fasilitasi dan advokasi penyerasian lingkungan 	5 Pkt	20 Pkt ^{K)}			2,5
		<ul style="list-style-type: none"> ■ Meningkatnya kemandirian masyarakat di permukiman transmigrasi pada Daerah Tertinggal 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Jumlah permukiman transmigrasi yang mandiri 	12 Kimtrans	132 Kimtrans ^{K)}			249,6
		<ul style="list-style-type: none"> ■ Meningkatnya Desa Mandiri Energi di kawasan Transmigrasi pada Daerah Tertinggal 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Jumlah permukiman transmigrasi yang akan berkembang menjadi Desa Mandiri Energi 	1 Kimtrans	5 Kimtrans ^{K)}			3,2
		<ul style="list-style-type: none"> ■ Meningkatnya kelestarian dan fungsi lingkungan hidup di kawasan transmigrasi pada Daerah Tertinggal 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Jumlah dokumen pengelolaan lingkungan 	1 Dok	8 Dok ^{K)}			4,0
			<ul style="list-style-type: none"> ■ Jumlah Evaluasi Perkembangan Kawasan Transmigrasi 	-	44 Kws ^{K)}			4,2
			<ul style="list-style-type: none"> ■ Jumlah mitigasi lingkungan 	7 Kws	22 Kws ^{K)}			11,1
		<ul style="list-style-type: none"> ■ Meningkatnya pengelolaan dan pemanfaatan lingkungan dalam mendukung kelestarian fungsi lingkungan hidup di kawasan transmigrasi pada Daerah Perbatasan 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Jumlah dokumen pengelolaan lingkungan hidup di kawasan transmigrasi 	4 Dok	26 Dok ^{K)}			3,0
			<ul style="list-style-type: none"> ■ Jumlah mitigasi lingkungan 	2 Kimtrans	16 Kimtrans ^{K)}			4,0
			<ul style="list-style-type: none"> ■ Jumlah fasilitasi dan advokasi penyerasian lingkungan 	1 Pkt	5 Pkt ^{K)}			0,5
		<ul style="list-style-type: none"> ■ Meningkatnya kemandirian masyarakat di permukiman transmigrasi pada Daerah Perbatasan 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Jumlah permukiman transmigrasi yang mandiri 	2 Kimtrans	21 Kimtrans ^{K)}			36,9

**BIDANG PEMBANGUNAN
PRIORITAS BIDANG**

**: WILAYAH DAN TATA RUANG
: Pembangunan Perdesaan**

NO	FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/LEMB AGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
		<ul style="list-style-type: none"> ■ Meningkatnya Desa Mandiri Energi dikawasan Transmigrasi pada Daerah Perbatasan 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Jumlah permukiman transmigrasi yang akan berkembang menjadi Desa Mandiri Energi 	1 Kimtrans	5 Kimtrans ^{K)}			3,2
		<ul style="list-style-type: none"> ■ Meningkatnya kelestarian dan fungsi lingkungan hidup di kawasan transmigrasi pada Daerah Perbatasan 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Jumlah dokumen pengelolaan lingkungan 	1 Dok	5 Dok ^{K)}			2,5
			<ul style="list-style-type: none"> ■ Jumlah Evaluasi terhadap Perkembangan Kawasan Transmigrasi 	-	12 Kws ^{K)}			1,2
			<ul style="list-style-type: none"> ■ Jumlah mitigasi lingkungan 	2 Kws	9 Kws ^{K)}			4,5
		<ul style="list-style-type: none"> ■ Meningkatnya pengelolaan dan pemanfaatan lingkungan dalam mendukung kelestarian fungsi lingkungan hidup di kawasan transmigrasi pada Wilayah 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Jumlah dokumen pengelolaan lingkungan hidup di kawasan transmigrasi 	6 Dok	28 Dok ^{K)}			5,7
			<ul style="list-style-type: none"> ■ Jumlah mitigasi lingkungan 	3 Kimtrans	25 Kimtrans ^{K)}			8,3
		<ul style="list-style-type: none"> ■ Meningkatnya kemandirian masyarakat di permukiman transmigrasi pada Wilayah Strategis 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Jumlah permukiman transmigrasi yang mandiri 	4 Kimtrans	38 Kimtrans ^{K)}			57,5
		<ul style="list-style-type: none"> ■ Meningkatnya kelestarian dan fungsi lingkungan hidup di kawasan transmigrasi pada Wilayah Strategis 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Jumlah dokumen pengelolaan lingkungan 	1 Dok	12 Dok ^{K)}			6,0
			<ul style="list-style-type: none"> · Jumlah Evaluasi terhadap Perkembangan Kawasan Transmigrasi 	-	12 Kws ^{K)}			1,2
			<ul style="list-style-type: none"> · Jumlah mitigasi lingkungan 	1 Kws	9 Kws ^{K)}			5,9

**BIDANG PEMBANGUNAN
PRIORITAS BIDANG**

**: WILAYAH DAN TATA RUANG
: Pembangunan Perdesaan**

NO	FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/LEMB AGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)		
				2010	2014					
c.	Fasilitasi perpindahan dan penempatan transmigrasi	- Terwujudnya persebaran penduduk yang serasi dengan daya dukung sumberdaya alam dan daya tampung lingkungan hidup di Kawasan Transmigrasi pada Daerah Tertinggal	- Jumlah keluarga yang difasilitasi perpindahannya ke Kawasan Transmigrasi	3.926 kel	21.230 kel ^{K)}	Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Kemen. Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, Ditjen P4T	105,4		
			- Jumlah keluarga penduduk yang tertata terintegrasi dalam Kawasan Transmigrasi	11.615 kel	63.527 kel ^{K)}			6,3		
			- Data administrasi kependudukan masyarakat di Kawasan Transmigrasi	3.926 kel	21.230 kel ^{K)}			2,0		
			- Jumlah bantuan perbekalan yang diberikan kepada calon transmigran	3.926 kel	21.230 kel ^{K)}			48,2		
			- Jumlah fasilitasi pelatihan calon transmigran	131 Aktn	708 Aktn ^{K)}			21,4		
		- Terwujudnya persebaran penduduk yang serasi dengan daya dukung sumberdaya alam dan daya tampung lingkungan hidup di Kawasan Transmigrasi pada Daerah Perbatasan	- Jumlah keluarga yang difasilitasi perpindahannya ke Kawasan Transmigrasi	2.617 kel	14.153 kel ^{K)}			Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Kemen. Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, Ditjen P4T	70,3
			- Jumlah keluarga penduduk yang tertata terintegrasi dalam Kawasan Transmigrasi	7.744 kel	42.352 kel ^{K)}					4,2
			- Data administrasi kependudukan masyarakat di Kawasan Transmigrasi	2.617 kel	14.153 kel ^{K)}					1,3
			- Jumlah bantuan perbekalan yang diberikan kepada calon transmigran	2.617 kel	14.149 kel ^{K)}					32,2
			- Jumlah fasilitasi pelatihan calon transmigran	87 Aktn	472 Aktn ^{K)}					14,3

BIDANG PEMBANGUNAN : WILAYAH DAN TATA RUANG
PRIORITAS BIDANG : Pembangunan Perdesaan

NO	FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
		· Terwujudnya persebaran penduduk yang serasi dengan daya dukung sumberdaya alam dan daya tampung lingkungan hidup di Kawasan Transmigrasi pada Wilayah Strategis	· Jumlah keluarga yang difasilitasi perpindahannya ke Kawasan Transmigrasi	1.640 kel	8.850 kel ^{K)}	Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Kemen. Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, Ditjen P4T	43,9
	· Jumlah keluarga penduduk yang tertata terintegrasi dalam Kawasan Transmigrasi		5.141 kel	26.771 kel ^{K)}	2,6			
	· Data administrasi kependudukan masyarakat di Kawasan Transmigrasi		1.640 kel	8.850 kel ^{K)}	0,8			
	· Jumlah bantuan perbekalan yang diberikan kepada calon transmigran		1.640 kel	8.850 kel ^{K)}	20,1			
	· Jumlah fasilitasi pelatihan calon transmigran		52 Aktn	291 Aktn ^{K)}	9,0			
TOTAL								56.579,4

Keterangan :

^{K)} Angka kumulatif 5 tahun (2010-2014)

BIDANG PEMBANGUNAN
PRIORITAS BIDANG

: WILAYAH DAN TATA RUANG
: Pengembangan Ekonomi Lokal dan Daerah

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
I	PENINGKATAN TATA KELOLA EKONOMI DAERAH	Kondusifnya iklim investasi dalam mendukung pengembangan ekonomi daerah.	1. Meningkatnya Indeks Kinerja Ekonomi Daerah	60	62			267,3
			2. Meningkatnya Indeks Komitmen Pemerintah Provinsi	63,1	65,1			
			3. Meningkatnya Indeks Kelembagaan Penanaman Modal	53,2	55,2			
			4. Meningkatnya Indeks Akses Lahan Usaha	60,5	62,5			
			5. Meningkatnya Indeks Kondisi Keamanan Usaha	55,5	57,5			
			6. Meningkatnya Indeks Iklim Investasi Daerah	61	63			
			7. Meningkatnya Indeks Promosi Investasi Daerah	54	60			
a	Peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah	Tersusunnya regulasi/kebijakan pengembangan ekonomi lokal dan daerah terkait dengan optimalisasi Potensi, Promosi, Sarana dan Prasarana, Kerjasama serta Kelembagaan Ekonomi Daerah	Jumlah regulasi/kebijakan yang disusun dan disahkan, terkait dengan optimalisasi potensi, promosi, sarana dan prasarana, kerjasama serta kelembagaan ekonomi daerah.	1 pkt	5 pkt ^{K)}	Program Pembangunan Daerah	Kementerian Dalam Negeri	7,5

**BIDANG PEMBANGUNAN
PRIORITAS BIDANG**

**: WILAYAH DAN TATA RUANG
: Pengembangan Ekonomi Lokal dan Daerah**

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
		Berkembangnya lembaga usaha ekonomi daerah, terutama di bidang permodalan dan perizinan usaha	Jumlah SOP/institusi/Unit Pelayanan Terpadu (UPT) untuk pelaksanaan OSS (One Stop Services), termasuk di kawasan perkotaan baru di kawasan transmigrasi, agropolitan /minapolitan, kawasan sentra produksi, klaster industri, dan kawasan khusus lainnya.	1 pkt	5 pkt ^{K)}			9,4
		Tersedianya data dan informasi tentang terkait dengan potensi, sarana dan prasarana, kerjasama dan kelembagaan ekonomi daerah	Tersedianya data dan info terkait dengan Potensi, Promosi, Sarana, Kerjasama dan Kelembagaan Ekonomi Daerah.	1 pkt	5 pkt			7,0

**BIDANG PEMBANGUNAN
PRIORITAS BIDANG**

**: WILAYAH DAN TATA RUANG
: Pengembangan Ekonomi Lokal dan Daerah**

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
			Terlaksananya desiminasi/sosialisasi hasil pengembangan data dan info terkait dengan potensi, promosi, sarana dan prasarana, kerjasama serta kelembagaan ekonomi daerah	1 pkt	5 pkt			11,0
		Terfasilitasinya Daerah dalam memecahkan permasalahan implementasi kebijakan yang terkait dengan Potensi, Promosi, Sarana dan Prasarana, Kerjasama serta Kelembagaan Ekonomi Daerah	Jumlah daerah yang terfasilitasi dalam upaya memecahkan permasalahan implementasi kebijakan yang terkait dengan Potensi, Promosi, Sarana dan Prasarana, Kerjasama serta Kelembagaan Ekonomi Daerah	15 prov/kab/ kota	25 prov/kab/kota			10,5
		Mempercepat proses perijinan di daerah	Jumlah daerah yang membentuk PTSP	5%	70%			113,8
			PTSP yang menerapkan SPIPISE	5%	60%			
			Pembatalan perda bermasalah	100%	100%			
			Daerah yang mengurangi biaya untuk berusaha	30%	70%			

BIDANG PEMBANGUNAN
PRIORITAS BIDANG

: WILAYAH DAN TATA RUANG
: Pengembangan Ekonomi Lokal dan Daerah

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
b.	Perencanaan Teknis Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi	<ul style="list-style-type: none"> ■ Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Trans-migrasi dan regulasi yang mendukung pengembangan kawasan transmigrasi sebagai kawasan Perkotaan Baru di kawasan tertinggal 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Jumlah MasterPlan, ActionPlan, dan Business Plan Wilayah Pembangunan Transmigrasi (WPT) di kawasan tertinggal 	1 Kws	5 Kws ^{K)}	Program Pengembangan Masyarakat Transmigrasi dan Kawasan Transmigrasi	Kementerian Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	3,9
			<ul style="list-style-type: none"> ■ Prosentase MasterPlan, Action Plan, dan Business Plan Wilayah Pembangunan Transmigrasi (WPT) yang disahkan di kawasan tertinggal 	100%	100%			40,8
		<ul style="list-style-type: none"> ■ Jumlah SDM Aparatur yang mampu mengelola kawasan perkotaan baru/KTM di kawasan tertinggal 	70 org	545 org ^{K)}				
		<ul style="list-style-type: none"> ■ Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Trans-migrasi dan regulasi yang mendukung pengembangan kawasan transmigrasi sebagai kawasan Perkotaan Baru di kawasan perbatasan 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Jumlah MasterPlan, ActionPlan, dan Business Plan Wilayah Pembangunan Transmigrasi (WPT) di kawasan perbatasan 	1 Kws	5 Kws ^{K)}	Program Pengembangan Masyarakat Transmigrasi dan Kawasan Transmigrasi	Kementerian Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	3,9

**BIDANG PEMBANGUNAN
PRIORITAS BIDANG**

**: WILAYAH DAN TATA RUANG
: Pengembangan Ekonomi Lokal dan Daerah**

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
			<ul style="list-style-type: none"> ■ Prosentase MasterPlan, Action Plan, dan Business Plan Wilayah Pembangunan Transmigrasi (WPT) yang disahkan di kawasan perbatasan 	100,00%	100,00%			
			<ul style="list-style-type: none"> ■ Jumlah SDM Aparatur yang mampu mengelola kawasan perkotaan baru/KTM di kawasan perbatasan 	15 org	65 org ^{k)}			4,0
c.	Pengembangan Usaha Ekonomi di kawasan transmigrasi	<ul style="list-style-type: none"> ■ Berkembangnya lembaga usaha ekonomi daerah, terutama di bidang permodalan dan perizinan usaha, di kawasan transmigrasi di kawasan tertinggal 	<ul style="list-style-type: none"> · Jumlah lembaga 	2 Kws	9 Kws ^{k)}	Program Pengembangan Masyarakat Transmigrasi dan Kawasan Transmigrasi	Kementerian Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	3,6
			<ul style="list-style-type: none"> · Perbankan/keuangan di kawasan transmigrasi di kawasan tertinggal 					
			<ul style="list-style-type: none"> · Jumlah koperasi di kawasan tertinggal 	2 unit	9 unit ^{k)}			5,4

**BIDANG PEMBANGUNAN
PRIORITAS BIDANG**

**: WILAYAH DAN TATA RUANG
: Pengembangan Ekonomi Lokal dan Daerah**

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
		<ul style="list-style-type: none"> ■ Berkembangnya lembaga usaha ekonomi daerah, terutama di bidang permodalan dan perizinan usaha, di kawasan transmigrasi di kawasan perbatasan 	- Jumlah lembaga Perbankan/keuangan di kawasan transmigrasi di kawasan perbatasan	1 Kws	5 Kws ^{K)}	Program Pengembangan Masyarakat Transmigrasi dan Kawasan Transmigrasi	Kementerian Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	2,0
			- Jumlah koperasi di kawasan perbatasan	2 unit	5 unit ^{K)}			4,2
		<ul style="list-style-type: none"> ■ Berkembangnya lembaga usaha ekonomi daerah, terutama di bidang permodalan dan perizinan usaha, di kawasan transmigrasi di kawasan strategis 	- Jumlah lembaga Perbankan/keuangan di kawasan strategis	1 unit	5 unit ^{K)}	Program Pengembangan Masyarakat Transmigrasi dan Kawasan Transmigrasi	Kementerian Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	2,5
			- Jumlah koperasi di kawasan strategis	1 unit	5 unit ^{K)}			6,0
d.	Penelitian dan Pengembangan untuk Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi	Tersedianya hasil penelitian dan pengembangan untuk pengembangan masyarakat dan Kawasan Transmigrasi yang dijadikan rekomendasi/ kebijakan	Jumlah hasil penelitian dan pengembangan untuk Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi yang dijadikan rekomendasi/ kebijakan	8 Keg	68 Keg ^{K)}	Program Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Kementerian Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	73,8
e.	Pengelolaan data dan informasi kawasan transmigrasi	Tersedianya data dan informasi kawasan transmigrasi	Jumlah data dan informasi kawasan transmigrasi	5	25 ^{K)}	Program Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Kementerian Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	71,8

BIDANG PEMBANGUNAN
PRIORITAS BIDANG

: WILAYAH DAN TATA RUANG
: Pengembangan Ekonomi Lokal dan Daerah

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
II	PENINGKATAN KAPASITAS SDM PENGELOLA EKONOMI DAERAH	Meningkatnya kemandirian dan keberlanjutan program/ kegiatan pengembangan ekonomi daerah, terutama di daerah	1. Meningkatnya Indeks Tenaga Kerja	63,4	65,4			75,1
a	Peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah	Terlaksananya peningkatan wawasan aparatur dalam bidang pengembangan ekonomi lokal dan daerah.	Jumlah workshop Diseminasi/ studi Banding mengenai pengembangan ekonomi lokal dan daerah.	1 pkt	5 pkt ^{k)}	Program Pembangunan Daerah	Kementerian Dalam Negeri	12,5
		Terbentuknya forum lintas stakeholder terkait perencanaan dan penganggaran program/kegiatan pengembangan ekonomi lokal dan daerah	Jumlah forum lintas stakeholder yang aktif	1 pkt	5 pkt ^{k)}			7,8
b.	Peningkatan Kapasitas SDM dan Masyarakat di kawasan transmigrasi	<ul style="list-style-type: none"> ■ Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengembangan masyarakat dan kawasan transmigrasi di Kawasan Tertinggal 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Jumlah pelatihan /Bintek/ Diseminasi/ studi Banding mengenai pengembangan ekonomi lokal dan daerah untuk aparatur pengelola kawasan transmigrasi di Kawasan Tertinggal 	3 kali	12 kali ^{k)}	Program Pengembangan Masyarakat Transmigrasi dan Kawasan Transmigrasi	Kementerian Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	7,0
		<ul style="list-style-type: none"> ■ Terlaksananya pelatihan BDS bagi masyarakat dan pengusaha lokal/ daerah di kawasan transmigrasi di Kawasan Tertinggal 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Jumlah pelatihan BDS bagi masyarakat dan pengusaha lokal/daerah di kawasan transmigrasi di Kawasan Tertinggal 	3 kali	16 kali ^{k)}			11,3

**BIDANG PEMBANGUNAN
PRIORITAS BIDANG**

**: WILAYAH DAN TATA RUANG
: Pengembangan Ekonomi Lokal dan Daerah**

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
		<ul style="list-style-type: none"> ■ Terbentuknya forum lintas stakeholder terkait perencanaan dan penganggaran program/ kegiatan pengembangan ekonomi lokal dan daerah di kawasan transmigrasi di Kawasan Tertinggal 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Jumlah forum lintas stakeholder yang aktif di Kawasan Tertinggal ■ % jumlah stakeholder non pemerintah yang terlibat di dalam forum lintas stakeholder di Kawasan Tertinggal 	5	43 ^{K)}			12,9
		<ul style="list-style-type: none"> ■ Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengembangan masyarakat dan kawasan transmigrasi di Kawasan Perbatasan 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Jumlah pelatihan /Bintek/ Diseminasi/ studi Banding mengenai pengembangan ekonomi lokal dan daerah untuk aparaturnya pengelola kawasan transmigrasi di Kawasan Perbatasan 	1 kali	5 kali ^{K)}			3,5
		<ul style="list-style-type: none"> ■ Terlaksananya pelatihan BDS bagi masyarakat dan pengusaha lokal/ daerah di kawasan transmigrasi di Kawasan Perbatasan 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Jumlah pelatihan BDS bagi masyarakat dan pengusaha lokal/daerah di kawasan transmigrasi di Kawasan Perbatasan 	1 kali	5 kali ^{K)}			3,5

**BIDANG PEMBANGUNAN
PRIORITAS BIDANG**

**: WILAYAH DAN TATA RUANG
: Pengembangan Ekonomi Lokal dan Daerah**

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
		<ul style="list-style-type: none"> Terbentuknya forum lintas stakeholder terkait perencanaan dan penganggaran program/ kegiatan pengembangan ekonomi lokal dan daerah di kawasan transmigrasi di Kawasan Perbatasan 	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah forum lintas stakeholder yang aktif di Kawasan Perbatasan % jumlah stakeholder non pemerintah yang terlibat di dalam forum lintas stakeholder di Kawasan Perbatasan 	1	11 ^{K)}			3,3
		<ul style="list-style-type: none"> Meningktanya partisipasi masyarakat dalam pengembangan masyarakat dan kawasan transmigrasi di Kawasan Strategis 	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah pelatihan /Bintek/ Diseminasi/ studi Banding mengenai pengembangan ekonomi lokal dan daerah untuk aparatur pengelola kawasan transmigrasi di Kawasan Strategis 	1 Kali	5 kali ^{K)}			6,5
		<ul style="list-style-type: none"> Terlaksananya pelatihan BDS bagi masyarakat dan pengusaha lokal/daerah di kawasan transmigrasi di Kawasan Strategis 	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah pelatihan BDS bagi masyarakat dan pengusaha lokal/daerah di kawasan transmigrasi di Kawasan Strategis 	1 Kali	5 kali ^{K)}			3,5

**BIDANG PEMBANGUNAN
PRIORITAS BIDANG**

**: WILAYAH DAN TATA RUANG
: Pengembangan Ekonomi Lokal dan Daerah**

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
		<ul style="list-style-type: none"> ■ Terbentuknya forum lintas stakeholder terkait perencanaan dan penganggaran program/ kegiatan pengembangan ekonomi lokal dan daerah di kawasan transmigrasi di Kawasan Strategis 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Jumlah forum lintas stakeholder yang aktif di Kawasan Strategis ■ % jumlah stakeholder non pemerintah yang terlibat di dalam forum lintas stakeholder di Kawasan Strategis 	2 Forum	11 Forum ^{K)}			3,3
				20%	50%			
C.	Fasilitasi Pengembangan Wilayah Terpadu	Terwujudnya optimalisasi pengembangan wilayah tertinggal, perbatasan, pesisir dan pulau kecil dan kawasan strategis dan cepat tumbuh	% pemerintah daerah yang melaksanakan kebijakan terkait dengan PNPM PISEW di 9 provinsi	20%	90%	Program Bina Pembangunan Daerah	Kementerian Dalam Negeri	50,5
III	PENINGKATAN FASILITASI/ PENDAMPINGAN DALAM PENGEMBANGAN EKONOMI LOKAL DAN DAERAH	Terintegrasinya sumber daya dari berbagai stakeholder (pemerintah, dunia usaha, dan akademisi) dalam upaya fasilitasi pengembangan ekonomi lokal dan daerah.	Terbentuknya lembaga fasilitasi pengembangan ekonomi lokal dan daerah (LRED Support Facility)	1 pkt	5 pkt ^{K)}			98,3
a.	Perencanaan pembangunan bidang perkotaan dan perdesaan (pengembangan ekonomi lokal dan daerah)	Terlaksananya penyusunan kebijakan pelaksanaan dan perencanaan pengembangan ekonomi lokal dan daerah	Tersusunnya kebijakan pengembangan ekonomi lokal dan daerah	1 pkt	5 pkt ^{K)}	Program Perencanaan Pembangunan Nasional	Kemeneq PPN	2,5
			Terbentuknya Forum Koordinasi Pengembangan Ekonomi Lokal dan Daerah	1 pkt	5 pkt ^{K)}			2,9

**BIDANG PEMBANGUNAN
PRIORITAS BIDANG**

**: WILAYAH DAN TATA RUANG
: Pengembangan Ekonomi Lokal dan Daerah**

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
		Terintegrasinya sumber daya dari berbagai stakeholder (pemerintah, dunia usaha, dan akademisi) dalam upaya fasilitasi pengembangan ekonomi lokal dan daerah.	Terbentuknya lembaga fasilitasi pengembangan ekonomi lokal (LRED Support Facility) di tingkat pusat.	1 pkt	5 pkt ^{K)}			2,5
b	Peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah	Meningkatnya ketersediaan tenaga fasilitasi dan jangka waktu fasilitasi kepada pelaku usaha ekonomi daerah mengenai kualitas produksi, pengolahan dan pemasaran	§ Jumlah tenaga fasilitator, baik di pusat maupun daerah, termasuk di kawasan transmigrasi, agropolitan/minapolitan, kawasan sentra produksi, klaster industri, dan kawasan strategis lainnya	1 pkt	5 pkt ^{K)}	Program Pembangunan Daerah	Kementerian Dalam Negeri	5,8
			§ Jumlah lembaga fasilitasi di daerah	1 unit	5 unit ^{K)}			2,8
			§ Jangka waktu penyelenggaraan fasilitasi di daerah, termasuk di kawasan transmigrasi, agropolitan/minapolitan, kawasan sentra produksi, klaster industri dan kawasan strategi lainnya.	10 bln	10 bln			

**BIDANG PEMBANGUNAN
PRIORITAS BIDANG**

**: WILAYAH DAN TATA RUANG
: Pengembangan Ekonomi Lokal dan Daerah**

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)	
				2010	2014				
c	Pengembangan Usaha Ekonomi di kawasan transmigrasi	Meningkatnya fasilitasi pengembangan usaha ekonomi kawasan transmigrasi sebagai kawasan perkotaan baru di Kawasan Tertinggal	■ Jumlah tenaga fasilitator di kawasan transmigrasi di Kawasan Tertinggal	328 org	1983 org ^{K)}	Program Pengembangan Masyarakat Transmigrasi dan Kawasan Transmigrasi	Kementerian Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	12,2	
			■ Jangka waktu penyelenggaraan fasilitasi di kawasan transmigrasi di Kawasan Tertinggal	12 Bln	60 Bln ^{K)}				
			■ Jumlah pendampingan Pengembangan Usaha Ekonomi Kawasan di Kawasan Tertinggal	3 Unit	15 unit ^{K)}				
			■ Agrocenter di Kawasan Tertinggal	-	10 Kws ^{K)}				20,0
			■ Pengembangan Investasi swasta di Kawasan Tertinggal	2 Kws	13 Kws ^{K)}				13,0
			■ Jumlah Unit Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA) di Kawasan Tertinggal	2 Kws	11 Kws ^{K)}				5,0

**BIDANG PEMBANGUNAN
PRIORITAS BIDANG**

**: WILAYAH DAN TATA RUANG
: Pengembangan Ekonomi Lokal dan Daerah**

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
		Meningkatnya fasilitasi pengembangan usaha ekonomi kawasan transmigrasi sebagai kawasan perkotaan baru di Kawasan Perbatasan	<ul style="list-style-type: none"> ■ Jumlah tenaga fasilitator di kawasan transmigrasi di Kawasan Perbatasan 	80 org	425 org ^{K)}			2,8
			<ul style="list-style-type: none"> ■ Jangka waktu penyelenggaraan fasilitasi di kawasan transmigrasi di Kawasan Perbatasan 	12 Bln	60 Bln ^{K)}			
			<ul style="list-style-type: none"> ■ Jumlah pendampingan Pengembangan Usaha Ekonomi Kawasan di Kawasan Perbatasan 	1 Unit	5 unit ^{K)}			
			<ul style="list-style-type: none"> ■ Agrocenter di Kawasan Perbatasan 	-	4 Kws ^{K)}			8,0
			<ul style="list-style-type: none"> ■ Pengembangan Investasi swasta di Kawasan Perbatasan 	1 Kws	5 Kws ^{K)}			5,0
			<ul style="list-style-type: none"> ■ Jumlah Unit PelayananJasa Alsintan (UPJA) di Kawasan Perbatasan 	1 Kws	5 Kws ^{K)}			2,5
		Meningkatnya fasilitasi pengembangan usaha ekonomi kawasan transmigrasi sebagai kawasan perkotaan baru di Kawasan Strategis	<ul style="list-style-type: none"> ■ Jumlah tenaga fasilitator di kawasan transmigrasi di Kawasan Strategis 	146 org	699 org ^{K)}			4,4

BIDANG PEMBANGUNAN
PRIORITAS BIDANG

: WILAYAH DAN TATA RUANG
: Pengembangan Ekonomi Lokal dan Daerah

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
			<ul style="list-style-type: none"> ■ Jangka waktu penyelenggaraan fasilitasi di kawasan transmigrasi di Kawasan Strategis ■ Jumlah pendampingan Pengembangan Usaha Ekonomi Kawasan di Kawasan Strategis ■ Agrocenter di Kawasan Strategis ■ Jumlah Unit Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA) di Kawasan Strategis 	12 Bln	60 Bln ^{K)}			
				4 Unit	20 Unit ^{K)}			6,0
				1 Kws	3 Kws ^{K)}			3,0
				1 Kws	3 Kws ^{K)}			
IV	PENINGKATAN KERJASAMA DALAM PENGEMBANGAN EKONOMI LOKAL DAN DAERAH	Meningkatnya hubungan kerjasama antar daerah dan kemitraan pemerintah-swasta dalam mendukung pengembangan ekonomi lokal dan daerah.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya jumlah KAD 2. Meningkatnya Indeks Peranan Dunia Usaha dalam Perekonomian Daerah 	42	62			42,1
				54,3	276,5 ^{K)}			
a	Peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah	Meningkatnya kualitas kerja sama antar daerah dan kemitraan pemerintah swasta dalam mendukung pengembangan ekonomi lokal dan daerah	Jumlah forum kerjasama antar daerah/wilayah	-	1 pkt evaluasi hasil kinerja forum kerjasama/kemitraan	Program Pembangunan Daerah	Kementerian Dalam Negeri	6,3

**BIDANG PEMBANGUNAN
PRIORITAS BIDANG**

**: WILAYAH DAN TATA RUANG
: Pengembangan Ekonomi Lokal dan Daerah**

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
			Jumlah sektor / bidang ekonomi yang dikerjasamakan	-	1 pkt evaluasi hasil kerjasama kemitraan dibid eklok antar daerah/ swasta			6,6
			Jumlah MoU PPP	-	1 pkt evaluasi potensi eklok yang dapat di kerjasamakan.			5,4
			-	Optimalisasi pelaksanaan kerjasama dlm rangka mendorong pengembangan eklok dan daerah (Care, Plan, CHF dan AusAID)	Evaluasi hasil kerjasama pengembangan eklok dan daerah (Care, Plan, CHF dan AusAID)			4,1

**BIDANG PEMBANGUNAN
PRIORITAS BIDANG**

**: WILAYAH DAN TATA RUANG
: Pengembangan Ekonomi Lokal dan Daerah**

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
		Meningkatnya kualitas kerja sama antar daerah dan kemitraan pemerintah swasta dalam mendukung pengembangan ekonomi lokal dan daerah	Jumlah forum kerjasama antar daerah/wilayah	-	1 pkt evaluasi hasil kinerja forum kerjasama/kemitraan			6,3
			-	Finalisasi pedum pengembangan model kerjasama ekonomi daerah	Evaluasi pelaksanaan pedum pengembangan model kerjasama ekonomi daerah			2,1
			-	Penyusunan instrumen kerjasama ekonomi daerah	Evaluasi pelaksanaan instrumen kerjasama ekonomi daerah			2,3

**BIDANG PEMBANGUNAN
PRIORITAS BIDANG**

**: WILAYAH DAN TATA RUANG
: Pengembangan Ekonomi Lokal dan Daerah**

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
b.	Pengembangan Usaha Ekonomi di kawasan transmigrasi	Meningkatnya kualitas kerja sama antar daerah dan kemitraan pemerintah swasta dalam mendukung pengembangan ekonomi kawasan di Kawasan Tertinggal	■ jumlah forum kerja sama antar daerah/wilayah di Kawasan Tertinggal	3 Forum	16 Forum ^{K)}	Program Pengembangan Masyarakat Transmigrasi dan Kawasan Transmigrasi	Kementerian Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	5,2
			■ jumlah sektor/bidang ekonomi yang dikerjasamakan di Kawasan Tertinggal	3 Sektor	16 Forum ^{K)}			
			■ Jumlah MoU sektor terkait di Kawasan Tertinggal	3	16 ^{K)}			
		Meningkatnya kualitas kerja sama antar daerah dan kemitraan pemerintah swasta dalam mendukung pengembangan ekonomi kawasan di Kawasan Perbatasan	■ jumlah forum kerja sama antar daerah/wilayah di Kawasan Perbatasan	1 Forum	5 Forum ^{K)}			2,0
			■ jumlah sektor/bidang ekonomi yang dikerjasamakan di Kawasan Perbatasan	1 Sektor	5 Sektor ^{K)}			
			■ Jumlah MoU sektor terkait di Kawasan Perbatasan	1	5 ^{K)}			

BIDANG PEMBANGUNAN
PRIORITAS BIDANG

: WILAYAH DAN TATA RUANG
: Pengembangan Ekonomi Lokal dan Daerah

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
		Meningkatnya kualitas kerja sama antar daerah dan kemitraan pemerintah swasta dalam mendukung pengembangan ekonomi kawasan di Kawasan Strategis	<ul style="list-style-type: none"> ■ jumlah forum kerja sama antar daerah/wilayah di Kawasan Strategis ■ jumlah sektor/ bidang ekonomi yang dikerja samakan di Kawasan Strategis ■ Jumlah MoU sektor terkait di Kawasan Strategis 	2	7 ^{k)}			1,8
V	PENINGKATAN AKSES TERHADAP SARANA DAN PRASARANA FISIK PENDUKUNG KEGIATAN EKONOMI LOKAL DAN DAERAH.	Meningkatnya akses terhadap sarana dan prasarana fisik pendukung kegiatan ekonomi lokal dan daerah	Meningkatnya Indeks Infrastruktur	55,8	57,8			2.508,7
a.	Pengembangan sarana dan prasarana kawasan transmigrasi	Meningkatnya akses terhadap sarana dan prasarana kawasan transmigrasi di Kawasan Tertinggal	<ul style="list-style-type: none"> ■ Pengembangan jalan ■ Pengembangan drainase 	9.2 km	62.65 km ^{k)}	Pengembangan Masyarakat Transmigrasi dan Kawasan Transmigrasi	Kemen. Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	96,4
				13 km	47 km ^{k)}			24,0

BIDANG PEMBANGUNAN
PRIORITAS BIDANG

: WILAYAH DAN TATA RUANG
: Pengembangan Ekonomi Lokal dan Daerah

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)	
				2010	2014				
			■ Pengembangan Sarana Air Bersih	5.555.556 liter	24042735 liter ^{K)}			37,0	
			■ Pengembangan Energi Terbarukan	176.457 watt	486.906 watt ^{K)}			80,5	
			■ Pengembangan Fasilitas Umum	3 unit	56 unit ^{K)}			116,9	
		Meningkatnya akses terhadap sarana dan prasarana kawasan transmigrasi di Kecamatan Bakti...	■ Pengembangan jalan	4 km	10.1 km ^{K)}			8,8	
			■ Pengembangan drainase	-	7 km ^{K)}			3,0	
			■ Pengembangan Sarana Air Bersih	-	3.333.334 liter ^{K)}			4,1	
			■ Pengembangan Energi Terbarukan	-	23.810 watt ^{K)}			3,5	
			■ Pengembangan Fasilitas Umum	3 unit	11 unit ^{K)}			7,1	
			Meningkatnya akses terhadap sarana dan prasarana kawasan transmigrasi di Kecamatan Bakti...	■ Pengembangan jalan	21,38 km	36.28 km ^{K)}			19,7
				■ Pengembangan drainase	-	9 km ^{K)}			3,8
		■ Pengembangan Sarana Air Bersih		-	3.333.334 liter ^{K)}			5,3	
		■ Pengembangan Energi Terbarukan		-	23.810 watt ^{K)}			3,5	

BIDANG PEMBANGUNAN
PRIORITAS BIDANG

: WILAYAH DAN TATA RUANG
: Pengembangan Ekonomi Lokal dan Daerah

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
			■ Pengembangan Fasilitas Umum	6 unit	26 unit ^{K)}			30,2
b.	Penyelenggaraan Pengembangan Permukiman	Tertanganinya kawasan-kawasan pusat pertumbuhan di perdesaan termasuk agropolitan	Jumlah kawasan perdesaan potensial / agropolitan yang tertangani	55 kws	205 kws ^{K)}	Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Kementerian Pekerjaan Umum	780,0
		Terbangunnya kawasan yang didukung oleh infrastruktur ekonomi dan sosial wilayah	Jumlah kawasan agropolitan yang dilayani oleh infrastruktur pendukung kegiatan ekonomi dan sosial	50 kws	185 kws ^{K)}			1.285,0
TOTAL								2.991,5

Keterangan :

^{K)} Angka kumulatif 5 tahun (2010-2014)

BIDANG PEMBANGUNAN
PRIORITAS BIDANG

: WILAYAH DAN TATA RUANG
: Pengembangan Kawasan Strategis

NO	FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
I	Pembentukan dan Pengembangan termasuk peningkatan pembinaan, pengawasan, dan perusahaan Kelembagaan pengelola KAPET, KPBPB, KEK dan kawasan strategis cepat tumbuh lainnya	Berkembangnya dan meningkatnya pengelolaan dan perusahaan kawasan melalui lembaga yang terpadu, dukungan pendanaan dan kejelasan regulasi	Persentase peningkatan Kinerja kelembagaan pengelolaan dan perusahaan kawasan	60%	100%			429,5
a	Pengembangan Kawasan dan Otorita	Meningkatnya pengembangan kawasan dan otorita di daerah	Persentase fasilitasi kawasan otorita, kawasan industri dan perdagangan bebas, dan kawasan kepentingan umum yang dikelola dan dikembangkan	65%	90%	Penguatan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Kemendagri	105,8
b.	Pengembangan wilayah terpadu	Terlaksananya koordinasi pengelolaan dan pengembangan kawasan	Persentase daerah yang menerapkan pedoman/kebijakan terkait dengan pengembangan potensi perekonomian daerah	50%	100%	Pembangunan Daerah	Kemendagri	323,7
TOTAL								429,5

BIDANG PEMBANGUNAN : WILAYAH DAN TATA RUANG
PRIORITAS BIDANG : Pengembangan Kawasan Perbatasan

NO	FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
I	Peningkatan pertumbuhan ekonomi kawasan perbatasan	Meningkatnya kegiatan perekonomian ekonomi kab/kota perbatasan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan	Presentase kab/kota di kawasan perbatasan yang memiliki pertumbuhan ekonomi setiap tahun sekurang-kurangnya sama dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi provinsi	20%	100%			24,5
a	Pengembangan wilayah terpadu	Meningkatnya pertumbuhan dan pemerataan hasil pembangunan kawasan perbatasan dan pulau-pulau kecil	Jumlah pedoman/kebijakan terkait dengan pengembangan wilayah perbatasan dan pulau-pulau kecil	1	1	Program Bina Pembangunan Daerah	Kemendagri	24,5
			Persentase wilayah perbatasan dan pulau-pulau kecil, yang mengimplementasikan pedoman/kebijakan terkait dengan pengembangan wilayah perbatasan dan pulau-pulau kecil	20%	90%			

NO	FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
I	Peningkatan pertumbuhan ekonomi kawasan perbatasan	Meningkatnya kegiatan perekonomian ekonomi kab/kota perbatasan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan	Presentase kab/kota di kawasan perbatasan yang memiliki pertumbuhan ekonomi setiap tahun sekurang-kurangnya sama dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi provinsi	20%	100%			24,5
a	Pengembangan wilayah terpadu	Meningkatnya pertumbuhan dan pemerataan hasil pembangunan kawasan perbatasan dan pulau-pulau kecil Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Kawasan Perbatasan	Jumlah pedoman/kebijakan terkait dengan pengembangan wilayah perbatasan dan pulau-pulau kecil Persentase terfasilitasinya wilayah perbatasan untuk mendorong pertumbuhan Ekonomi.	1 5%	1 100%	Program Bina Pembangunan Daerah	Kemendagri	24,5
II	Penguatan kapasitas kelembagaan dalam upaya pengembangan kawasan perbatasan secara terintegrasi	Meningkatnya kapasitas kelembagaan dalam pengembangan kawasan perbatasan beserta infrastruktur penunjangnya	Persentase Kab/Kota perbatasan yang telah memiliki pengaturan kelembagaan dalam pengembangan kawasan perbatasan secara terintegrasi	20%	100%			1.124,2

NO	FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
I	Peningkatan pertumbuhan ekonomi kawasan perbatasan	Meningkatnya kegiatan perekonomian ekonomi kab/kota perbatasan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan	Presentase kab/kota di kawasan perbatasan yang memiliki pertumbuhan ekonomi setiap tahun sekurang-kurangnya sama dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi provinsi	20%	100%			24,5
a	Pengembangan wilayah terpadu	Meningkatnya pertumbuhan dan pemerataan hasil pembangunan kawasan perbatasan dan pulau-pulau kecil	Jumlah pedoman/kebijakan terkait dengan pengembangan wilayah perbatasan dan pulau-pulau kecil	1	1	Program Bina Pembangunan Daerah	Kemendagri	24,5
			Presentase PKSN dan kecamatan perbatasan dengan infrastruktur penunjang pelayanan pemerintahan sesuai kebutuhan	20%	100%			
			Persentase kab/kota di perbatasan yang tergolong wilayah tertinggal dengan indeks ketertinggalan yang semakin membaik	20%	100%			

NO	FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
I	Peningkatan pertumbuhan ekonomi kawasan perbatasan	Meningkatnya kegiatan perekonomian kab/kota perbatasan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan	Presentase kab/kota di kawasan perbatasan yang memiliki pertumbuhan ekonomi setiap tahun sekurang-kurangnya sama dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi provinsi	20%	100%			24,5
a	Pengembangan wilayah terpadu	Meningkatnya pertumbuhan dan pemerataan hasil pembangunan kawasan perbatasan dan pulau-pulau kecil	Jumlah pedoman/kebijakan terkait dengan pengembangan wilayah perbatasan dan pulau-pulau kecil	1	1	Program Bina Pembangunan Daerah	Kemendagri	24,5
a	Pengembangan dan Penataan Wilayah Administrasi dan Perbatasan	Meningkatnya kemampuan pengelolaan Pos Lintas Batas (PLB) internasional dan tradisional secara terpadu yang telah disepakati antar negara	Jumlah Pos lintas Batas tradisional dan internasional dengan kualitas manajemen pengelolaan serta fasilitas pendukung yang memadai	3	3	Program Penguatan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Kemendagri	977,2
		Terfasilitasnya penguatan kelembagaan wilayah perbatasan antar negara	Presentase penguatan kelembagaan di pusat dan daerah dalam rangka penanganan perbatasan antar negara.	25%	100%			

NO	FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
I	Peningkatan pertumbuhan ekonomi kawasan perbatasan	Meningkatnya kegiatan perekonomian ekonomi kab/kota perbatasan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan	Presentase kab/kota di kawasan perbatasan yang memiliki pertumbuhan ekonomi setiap tahun sekurang-kurangnya sama dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi provinsi	20%	100%			24,5
a	Pengembangan wilayah terpadu	Meningkatnya pertumbuhan dan pemerataan hasil pembangunan kawasan perbatasan dan pulau-pulau kecil Meningkatnya sarpras perbatasan antar negara dan pulau-pulau terluar dalam rangka pelayanan umum pemerintahan Meningkatnya kerjasama perbatasan antar negara (SOSEKMALINDO, JBC RI-RDTL, JBC RI-PNG)	Jumlah pedoman/kebijakan terkait dengan pengembangan wilayah perbatasan dan pulau-pulau kecil Presentase jumlah kab/kota di wilayah perbatasan antar negara dan pulau-pulau terluar yang mendapat sarpras perbatasan antar negara Jumlah provinsi yang termasuk ke dalam perbatasan antar negara (SOSEKMALINDO, JBC RI-RDTL, JBC RI-PNG)	1 25% 6	1 100% 6	Program Bina Pembangunan Daerah	Kemendagri	24,5

NO	FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
I	Peningkatan pertumbuhan ekonomi kawasan perbatasan	Meningkatnya kegiatan perekonomian ekonomi kab/kota perbatasan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan	Presentase kab/kota di kawasan perbatasan yang memiliki pertumbuhan ekonomi setiap tahun sekurang-kurangnya sama dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi provinsi	20%	100%			24,5
a.	Pengembangan wilayah terpadu	Meningkatnya pertumbuhan dan pemerataan hasil pembangunan kawasan perbatasan dan pulau-pulau kecil	Jumlah pedoman/kebijakan terkait dengan pengembangan wilayah perbatasan dan pulau-pulau kecil	1	1	Program Bina Pembangunan Daerah	Kemendagri	24,5
b.	Pengembangan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi daerah tertinggal di kawasan perbatasan	Meningkatnya koordinasi antar sektor dalam pengembangan daerah tertinggal di kawasan perbatasan	Jumlah rencana aksi pengembangan daerah tertinggal di kawasan perbatasan yang dikoordinasikan	27	27	Program Percepatan Pengembangan Ekonomi Daerah Tertinggal	KPDT	147,0
TOTAL								1.148,7

BIDANG PEMBANGUNAN
PRIORITAS BIDANG

: WILAYAH DAN TATA RUANG
: Pengembangan Pembangunan Daerah Tertinggal

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
I	Pengembangan ekonomi lokal	Peningkatan rata-rata PDRB Perkapita Non Migas di daerah tertinggal Berkurangnya persentase penduduk miskin di daerah tertinggal	Rata-rata PDRB Perkapita Non Migas di daerah tertinggal rata-rata persentase penduduk miskin di daerah tertinggal	9,2 Jt 18.8%	11,6Jt 14.2%			1.267,2

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
a	Pengembangan kebijakan, koordinasi dan fasilitasi pusat produksi daerah tertinggal	1. Meningkatnya pengembangan pusat produksi di daerah tertinggal 2. Terfasilitasinya pemulihan ekonomi dan pengurangan kemiskinan, dengan menciptakan dan memberdayakan lingkungan pendukung bagi perbaikan kegiatan usaha dan pembangunan manusia	1. Persentase kabupaten di daerah tertinggal yang memiliki pusat produksi 2. (a). meningkatkan kemampuan dan keberdayaan petani skala kecil dan aparat pemerintah untuk mendukung kegiatan usaha berbasis kelompok di perdesaan, (b). Melaksanakan kegiatan perbaikan usaha pertanian dan usaha lainnya, (c). Meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam perencanaan belanja publik, manajemen pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasi program.	20%	100%	Program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal	KPDT	309,6

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
b.	Pengembangan kebijakan, koordinasi dan fasilitasi Pusat Pertumbuhan Daerah Tertinggal	1. Meningkatnya pengembangan pusat pertumbuhan di Daerah Tertinggal 2. Terfasilitasinya pembiayaan untuk pengembangan ekonomi	1. Persentase kabupaten di daerah tertinggal yang memiliki Pusat Pertumbuhan 2. Persentase kabupaten di daerah tertinggal yang mendapatkan fasilitasi pembiayaan untuk pengembangan ekonomi melalui (a) Berkembangnya sektor usaha swasta berorientasi pasar, (b) meningkatnya kualitas dan nilai tambah produksi pertanian, perikanan, dan perkebunan, (c). Meningkatkan perdagangan internasional, dan (d). Meningkatkan investasi dalam negeri maupun luar negeri	20%	100%	Program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal	KPDT	676,6
c	Pengembangan kebijakan, koordinasi dan fasilitasi usaha mikro kecil menengah dan koperasi daerah tertinggal	Meningkatnya pengembangan usaha mikro kecil menengah dan koperasi di daerah tertinggal	Persentase daerah tertinggal yang mengembangkan usaha mikro kecil menengah dan koperasi di daerah tertinggal	20%	100%	Program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal	KPDT	93,0

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
d	Pengembangan kebijakan, koordinasi dan fasilitasi pendanaan dan kemitraan usaha daerah tertinggal	Meningkatnya ketersediaan sumber pendanaan dan pengembangan kemitraan usaha di daerah tertinggal	Persentase kabupaten didaerah tertinggal yang telah memiliki sumber pendanaan dan melaksanakan kemitraan usaha dengan daerah lain.	20%	100%	Program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal	KPDT	92,0
e	Pengembangan kebijakan, koordinasi dan fasilitasi investasi ekonomi daerah daerah tertinggal	Meningkatnya jumlah dan nilai investasi di daerah tertinggal	Persentase kabupaten di daerah tertinggal yang telah meningkatkan jumlah dan nilai investasi	20%	100%	Program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal	KPDT	96,0
II	Penguatan kelembagaan masyarakat dan pmda dalam pengelolaan sumberdaya lokal	Meningkatnya PAD di kabupaten daerah tertinggal	Rata-rata Laju peningkatan PAD di kabupaten daerah tertinggal					1.630,1
a	Peningkatan kapasitas kelembagaan dan pelatihan masyarakat	Meningkatnya kapasitas kelembagaan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan	Jumlah daerah tertinggal yang memperoleh fasilitasi peningkatan kelembagaan dan pelatihan masyarakat (provinsi)	32	32	Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa	Kemendagri	63,0

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
b	Pengembangan kebijakan, koordinasi dan fasilitasi penguatan kelembagaan pemerintah daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan pasca konflik.	1. Meningkatnya kemampuan sistem, organisasi, dan SDM pemerintahan daerah untuk mewujudkan good governance 2. (i) Meningkatnya kemampuan kelembagaan Pemda dan masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya lokal, (ii) Meningkatnya kegiatan ekonomi, pengembangan sumberdaya manusia, dan infrastruktur lingkungan perdesaan secara terpadu di daerah tertinggal, dan (iii) Meningkatkan mobilitas penduduk dan arus barang antara daerah tertinggal ke pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan pelayanan publik, melalui PNPB Mandiri	1. Persentase kabupaten didaerah tertinggal yang memperoleh fasilitasi penguatan kelembagaan pemerintah daerah dan mengalami peningkatan indeks good governance 2. (i) Persentase jumlah kabupaten tertinggal yang kemampuan kelembagaan pembangunan masyarakat dan pemda meningkat dalam pengelolaan sumberdaya lokal, (ii) Persentase jumlah kawasan pembangunan perdesaan yang terpadu dari aspek ekonomi, sumberdaya manusia, dan infratraktur lingkungan, dan (iii) Persentase kabupaten didaerah tertinggal yang mengalami peningkatan mobilitas penduduk dan arus barang antara daerah tertinggal ke pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan pelayanan publik	20%	100%	Program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal	KPDT	1.227,5
				64%	100%			

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
c	Pengembangan kebijakan, koordinasi dan fasilitasi penguatan kelembagaan sosial masyarakat daerah tertinggal	Meningkatnya kapasitas kelembagaan sosial masyarakat daerah tertinggal	Persentase kabupaten didaerah tertinggal yang memperoleh fasilitasi penguatan kelembagaan sosial masyarakat daerah tertinggal	20%	100%	Program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal	KPDT	89,0
d	Pengembangan kebijakan, koordinasi dan fasilitasi lembaga kerjasama antar daerah daerah tertinggal	Meningkatnya kerjasama antar lembaga pemerintah di daerah tertinggal	persentase kabupaten daerah tertinggal yang menjalin kerjasama dengan pemerintah daerah lain.	20%	100%	Program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal	KPDT	85,0
e	Pengembangan kebijakan, koordinasi dan fasilitasi lembaga perekonomian daerah tertinggal	Meningkatnya kapasitas lembaga perekonomian daerah tertinggal	persentase kabupaten didaerah tertinggal yang memperoleh fasilitasi penguatan lembaga perekonomian di daerah tertinggal	20%	100%	Program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal	KPDT	77,0
f	Pengembangan kebijakan, koordinasi dan fasilitasi kemitraan antar lembaga daerah daerah tertinggal	Meningkatnya kemitraan antar lembaga pemerintahan kabupaten daerah tertinggal	persentase kabupaten didaerah tertinggal yang memperoleh fasilitasi penguatan kemitraan antar lembaga daerah tertinggal	20%	100%	Program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal	KPDT	77,0
g	Koordinasi pengelolaan masyarakat kawasan tertinggal	Terselenggaranya koordinasi pengelolaan masyarakat kawasan tertinggal	Jumlah rapat koordinasi wawasan kebangsaan Jumlah pemantauan dan evaluasi	12 4	12 4	Program Peningkatan Koordinasi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan	Kemenko Polhukam	3,4

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
h	Pembinaan Administrasi Pendapatan dan Investasi Daerah	Meningkatnya kemampuan administrasi pendapatan dan investasi daerah	persentase kabupaten daerah tertinggal yang memperoleh fasilitasi peningkatan kemampuan administrasi pendapatan dan investasi daerah	0%	50%	Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kemendagri	8,2
III	Peningkatan pelayanan Kesehatan yang berkualitas dan terjangkau di Daerah Tertinggal	1.Peningkatan rata-rata Angka Harapan Hidup di daerah tertinggal 2.Berkurangnya Angka Kematian Bayi (AKB) di daerah tertinggal 3.Meningkatnya persentase Penolong Persalinan Terakhir oleh Tenaga Kesehatan	1. Rata-rata AHH di daerah tertinggal yang berada di bawah rata-rata nasional (Tahun) 2. AKB di daerah tertinggal (per 1000 kelahiran hidup) 3. Persentase Penolong Persalinan Terakhir oleh Tenaga Kesehatan (%)	67,5 25,2 74,7	68,6 22,8 100			132,0
a	Pengembangan kebijakan, koordinasi dan fasilitasi pembangunan infrastruktur kesehatan daerah tertinggal	Meningkatnya koordinasi pembangunan infrastruktur kesehatan daerah tertinggal	Persentase kabupaten didaerah tertinggal yang memperoleh fasilitasi pembangunan infrastruktur kesehatan daerah tertinggal	20%	100%	Program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal	KPDT	70,0

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
b	Pengembangan kebijakan, koordinasi dan fasilitasi Kesehatan Dasar, Lanjutan Daerah Tertinggal	Meningkatnya persentase kabupaten didaerah tertinggal yang memiliki kebijakan di bidang Kesehatan Dasar Daerah Tertinggal	Persentase kabupaten didaerah tertinggal yang memiliki kebijakan di bidang Kesehatan Dasar Daerah Tertinggal	20%	100%	Program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal	KPDT	62,0
IV	Peningkatan pelayanan pendidikan di Daerah Tertinggal	1. Meningkatnya rata-rata angka melek huruf usia 15-24 tahun di kabupaten daerah tertinggal 2. Meningkatnya rata-rata lama sekolah penduduk di daerah tertinggal 3. Meningkatnya rata-rata APS usia 7-12 tahun di kabupaten daerah tertinggal 4. Meningkatnya rata-rata APS usia 13-15 tahun di kabupaten daerah tertinggal (berada di bawah rata-rata nasional)	1. Angka Melek Huruf usia 15- 24 tahun di kabupaten daerah tertinggal (%) 2. Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun di kabupaten daerah tertinggal (Tahun) 3. Rata-rata APS usia 7-12 tahun di kabupaten daerah tertinggal (%) 4. Rata-rata APS usia 13-15 tahun di kabupaten daerah tertinggal (%)	97,8 7,3 97,0 89,6	99,6 7,7 99,4 97,9			183,0

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
a	Pengembangan kebijakan, koordinasi dan fasilitasi pembangunan infrastruktur pendidikan daerah tertinggal	Meningkatnya persentase kabupaten didaerah tertinggal yang memiliki kebijakan di bidang pembangunan infrastruktur pendidikan daerah tertinggal	Persentase kabupaten didaerah tertinggal yang memiliki kebijakan di bidang pembangunan infrastruktur pendidikan daerah tertinggal	20%	100%	Program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal	KPDT	48,0
b	Pengembangan kebijakan, koordinasi dan fasilitasi Pendidikan Dasar, Menengah Dan Kejuruan di Daerah Tertinggal	Meningkatnya persentase kabupaten didaerah tertinggal yang memiliki kebijakan Pendidikan Dasar, Menengah Dan Kejuruan Daerah Tertinggal	Persentase kabupaten didaerah tertinggal yang memiliki kebijakan Pendidikan Dasar, Menengah Dan Kejuruan Daerah Tertinggal	20%	100%	Program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal	KPDT	48,0
c	Pengembangan kebijakan, koordinasi dan fasilitasi Pendidikan Luar Sekolah Daerah Tertinggal	Meningkatnya persentase kabupaten didaerah tertinggal yang memiliki kebijakan di bidang Pendidikan Luar Sekolah Daerah Tertinggal	Persentase kabupaten didaerah tertinggal yang memiliki kebijakan di bidang Pendidikan Luar Sekolah Daerah Tertinggal	20%	100%	Program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal	KPDT	87,0

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
V	Peningkatan sarana dan prasarana daerah tertinggal serta aksesibilitas daerah tertinggal dengan pusat-pusat pertumbuhan	Meningkatnya persentase daerah tertinggal yang telah tersedia sarana dan prasarana pendukung aktivitas ekonomi Meningkatnya nilai dan volume perdagangan di daerah tertinggal	Indeks infrastruktur nilai dan volume perdagangan di daerah tertinggal					682,5
a	Pengembangan kebijakan, koordinasi dan fasilitasi pembangunan infrastruktur ekonomi daerah tertinggal	Meningkatnya persentase kabupaten didaerah tertinggal yang memiliki kebijakan pembangunan infrastruktur ekonomi daerah tertinggal	Persentase kabupaten didaerah tertinggal yang memiliki kebijakan pembangunan infrastruktur ekonomi daerah tertinggal	20%	100%	Program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal	KPDT	170,0

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
b	Pengembangan kebijakan, koordinasi dan fasilitasi pembangunan infrastruktur energi daerah tertinggal	<p>1. Meningkatnya persentase kabupaten didaerah tertinggal yang memiliki kebijakan pembangunan infrastruktur energi daerah tertinggal</p> <p>2. Meningkatnya Pemanfaatan Energi Matahari untuk Pengembangan Infrastruktur Dasar di Wilayah Perdesaan Tertinggal Terpencil</p>	<p>1. Persentase kabupaten didaerah tertinggal yang memiliki kebijakan pembangunan infrastruktur energi daerah tertinggal</p> <p>2. Persentase kabupetan didaerah tertinggal yang memiliki database permintaan kelistrikan dengan menggunakan teknologi GIS dan memanfaatkan energi matahari untuk pengembangan infrastruktur serta peningkatan kemampuan masyarakat yang dapat melakukan pemetaan Wilayah Rentan Perubahan Iklim dan Kegiatan Adaptasi Untuk Mengantisipasi Perubahan Iklim</p>	20%	100%	Program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal	KPDT	220,5

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
c	Pengembangan kebijakan, koordinasi dan fasilitasi pembangunan infrastruktur telekomunikasi daerah tertinggal	Meningkatnya persentase kabupaten didaerah tertinggal yang memiliki kebijakan pembangunan infrastruktur telekomunikasi daerah tertinggal	Persentase kabupaten didaerah tertinggal yang memiliki kebijakan pembangunan infrastruktur telekomunikasi daerah tertinggal	20%	100%	Program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal	KPDT	60,0
d	Pengembangan kebijakan, koordinasi dan fasilitasi Pembangunan Infrastruktur Transportasi Daerah Tertinggal	Meningkatnya persentase kabupaten didaerah tertinggal yang memiliki kebijakan di bidang pembangunan infrastruktur transportasi daerah tertinggal	Persentase kabupaten didaerah tertinggal yang memiliki kebijakan di bidang pembangunan infrastruktur pendidikan daerah tertinggal	20%	100%	Program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal	KPDT	232,0
TOTAL								3.894,8

BIDANG PEMBANGUNAN : WILAYAH DAN TATA RUANG
PRIORITAS BIDANG : Penanggulangan Bencana dan Pengurangan Resiko Bencana

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
I	Peningkatan kapasitas aparaturn pemerintah dan masyarakat dalam usaha pengurangan risiko, mitigasi dan penanganan bencana dan bahaya kebakaran hutan di 33 propinsi	Meningkatnya kapasitas aparaturn pemerintah dan masyarakat dalam usaha pengurangan risiko, mitigasi dan penanganan bencana dan bahaya kebakaran hutan di 33 propinsi	Terlaksananya peningkatan kapasitas aparaturn pemerintah dan masyarakat dalam usaha pengurangan risiko, mitigasi dan penanganan bencana dan bahaya kebakaran hutan di 33 propinsi					782,6
a	Pencegahan dan pengurangan risiko bencana	1. Tersusunnya dokumen rencana aksi daerah pengurangan risiko bencana 2. Terlaksananya dukungan pembentukan kelembagaan penanggulangan bencana daerah	1. Jumlah rencana aksi daerah pengurangan risiko bencana yang tersusun (Provinsi & kab/Kota) 2. Terbentuknya kelembagaan penanggulangan bencana daerah (Provinsi & kab/Kota)	23 & 48	33 (s/d 2011) & 275	Penanggulangan bencana	BNPB	74,3
b.	Pemberdayaan masyarakat dalam kesiapan menghadapi bencana	Meningkatnya kapasitas aparaturn dan terlaksananya pembinaan kelembagaan pemerintah dan masyarakat dalam penanggulangan bencana di daerah	Terlaksananya pelatihan dan pembinaan aparaturn dan masyarakat dalam penanggulangan bencana di daerah (Provinsi & kab/Kota)	23 & 48	33 (s/d 2011) & 275	Penanggulangan bencana	BNPB	34,5
c	Penyiapan peralatan dan logistik dikawasan rawan bencana	1. Pemenuhan kebutuhan logistik kebencanaan	1. Terlaksananya pemenuhan kebutuhan logistik kebencanaan (Provinsi & kab/Kota)	16 & 0	17 (s/d 2012) & 77	Penanggulangan bencana	BNPB	230,2

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
I	Peningkatan kapasitas aparaturn pemerintah dan masyarakat dalam usaha pengurangan risiko, mitigasi dan penanganan bencana dan bahaya kebakaran hutan di 33 propinsi	Meningkatnya kapasitas aparaturn pemerintah dan masyarakat dalam usaha pengurangan risiko, mitigasi dan penanganan bencana dan bahaya kebakaran hutan di 33 propinsi	Terlaksananya peningkatan kapasitas aparaturn pemerintah dan masyarakat dalam usaha pengurangan risiko, mitigasi dan penanganan bencana dan bahaya kebakaran hutan di 33 propinsi					782,6
a	Pencegahan dan pengurangan risiko bencana	1. Tersusunnya dokumen rencana aksi daerah pengurangan risiko bencana	1. Jumlah rencana aksi daerah pengurangan risiko bencana yang tersusun (Provinsi & kab/Kota)	23 & 48	33 (s/d 2011) & 275	Penanggulangan bencana	BNPB	74,3
		2. Pendistribusian logistik kebencanaan pada daerah bencana	2. Terlaksananya pendistribusian logistik kebencanaan pada daerah bencana (Provinsi & kab/Kota)					
		1. Pemenuhan kebutuhan peralatan kebencanaan	1. Terlaksananya Pemenuhan kebutuhan peralatan kebencanaan	16 & 0	17 (s/d 2012) & 77	Penanggulangan bencana	BNPB	157,8
		2. Pendistribusian peralatan kebencanaan pada daerah bencana	2. Terlaksananya pendistribusian peralatan kebencanaan pada daerah bencana					
d	Pengembangan aplikasi teknologi informasi dan komunikasi untuk pengurangan risiko dan mitigasi bencana alam	1. Tersedianya data spasial kebencanaan	1. Tersedianya data spasial kebencanaan	5	33 ⁸⁾	Penanggulangan bencana	BNPB	74,2
		2. Tersedianya sistem informasi penanggulangan bencana	2. Tersedianya sistem informasi penanggulangan bencana					

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
I	Peningkatan kapasitas aparat pemerintah dan masyarakat dalam usaha pengurangan risiko, mitigasi dan penanganan bencana dan bahaya kebakaran hutan di 33 propinsi	Meningkatnya kapasitas aparat pemerintah dan masyarakat dalam usaha pengurangan risiko, mitigasi dan penanganan bencana dan bahaya kebakaran hutan di 33 propinsi	Terlaksananya peningkatan kapasitas aparat pemerintah dan masyarakat dalam usaha pengurangan risiko, mitigasi dan penanganan bencana dan bahaya kebakaran hutan di 33 propinsi					782,6
a	Pencegahan dan pengurangan risiko bencana	1. Tersusunnya dokumen rencana aksi daerah pengurangan risiko bencana	1. Jumlah rencana aksi daerah pengurangan risiko bencana yang tersusun (Provinsi & kab/Kota)	23 & 48	33 (s/d 2011) & 275	Penanggulangan bencana	BNPB	74,3
e	Pengembangan Manajemen Pencegahan dan Penanggulangan Bencana	Meningkatnya sarpras Pemerintahan Pasca Bencana/pengurangan resiko bencana	Prosentase sarpras yang diberikan kepada daerah	40%	75%	Penguatan penyelenggaraan pemerintahan umum	Kemendagri	211,7
		Meningkatnya kapasitas aparat dalam upaya penanggulangan bencana daerah dan bahaya kebakaran	Prosentase fasilitasi peningkatan kapasitas aparat dalam upaya penanggulangan bencana dan bahaya kebakaran	75%	75%	Penguatan penyelenggaraan pemerintahan umum	Kemendagri	
II	Pelaksanaan tanggap darurat dan penanganan korban bencana alam dan kerusuhan sosial yang terkoordinasi, efektif dan terpadu (Pembentukan tim gerak cepat (unit khusus penanganan bencana) dengan dukungan alat transportasi yang memadai dengan basis 2 lokasi strategis (Jakarta-Malang) yang dapat menjangkau seluruh wilayah Indonesia)	Penyelamatan dan evakuasi korban bencana yang cepat efektif dan terpadu (Terbentuknya tim gerak cepat (unit khusus penanganan bencana) dengan dukungan alat transportasi yang memadai dengan basis 2 lokasi strategis (Jakarta-Malang) yang dapat menjangkau seluruh wilayah Indonesia)	Terlaksananya penyelamatan dan evakuasi korban bencana yang cepat efektif dan terpadu (Terbentuknya tim gerak cepat (unit khusus penanganan bencana) dengan dukungan alat transportasi yang memadai dengan basis 2 lokasi strategis (Jakarta-Malang) yang dapat menjangkau seluruh wilayah Indonesia)					12,9
a	Penanganan pengungsi akibat bencana	Penanganan pengungsi akibat bencana secara efektif dan terpadu	Terlaksananya penanganan pengungsi akibat bencana secara efektif dan terpadu	55	175	Penanggulangan bencana	BNPB	12,9

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
I	Peningkatan kapasitas aparaturn pemerintah dan masyarakat dalam usaha pengurangan risiko, mitigasi dan penanganan bencana dan bahaya kebakaran hutan di 33 propinsi	Meningkatnya kapasitas aparaturn pemerintah dan masyarakat dalam usaha pengurangan risiko, mitigasi dan penanganan bencana dan bahaya kebakaran hutan di 33 propinsi	Terlaksananya peningkatan kapasitas aparaturn pemerintah dan masyarakat dalam usaha pengurangan risiko, mitigasi dan penanganan bencana dan bahaya kebakaran hutan di 33 propinsi					782,6
a	Pencegahan dan pengurangan risiko bencana	1. Tersusunnya dokumen rencana aksi daerah pengurangan risiko bencana	1. Jumlah rencana aksi daerah pengurangan risiko bencana yang tersusun (Provinsi & kab/Kota)	23 & 48	33 (s/d 2011) & 275	Penanggulangan bencana	BNPB	74,3
III	Rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah pasca bencana Provinsi Jawa Barat, Provinsi Sumatera Barat dan wilayah pasca bencana lainnya	Terehabilitasi dan terekonstruksinya wilayah pasca bencana Provinsi Jawa Barat, Provinsi Sumatera Barat dan wilayah pasca bencana lainnya	Terlaksananya percepatan pemulihan di wilayah pasca bencana Provinsi Jawa Barat, Provinsi Sumatera Barat dan wilayah pasca bencana lainnya					32,6
a	Rehabilitasi dan rekonstruksi bidang prasarana fisik di wilayah pasca bencana	Koordinasi dan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi bidang prasarana fisik di wilayah pasca bencana (Jawa Barat, Sumatera Barat dan Wilayah Pasca Bencana lainnya)	Terlaksananya koordinasi dan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi bidang prasarana fisik di wilayah pasca bencana (Jawa Barat, Sumatera Barat dan Wilayah Pasca Bencana lainnya)	15	30	Penanggulangan bencana	BNPB	13,4
b	Rehabilitasi dan rekonstruksi bidang sosial ekonomi di wilayah pasca bencana	Koordinasi dan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi bidang prasarana sosial ekonomi di wilayah pasca bencana (Jawa Barat, Sumatera Barat dan Wilayah Pasca Bencana lainnya)	Terlaksananya koordinasi dan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi bidang prasarana sosial ekonomi di wilayah pasca bencana (Jawa Barat, Sumatera Barat dan Wilayah Pasca Bencana lainnya)	15	30	Penanggulangan bencana	BNPB	19,2
TOTAL								828,1

Keterangan :

^{K)} Angka kumulatif 5 tahun (2010-2014)

BIDANG PEMBANGUNAN
PRIORITAS BIDANG

: WILAYAH DAN TATA RUANG

: Pemantapan Desentralisasi, Peningkatan Kualitas Hubungan Pusat Daerah dan Antardaerah

NO	FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
I	Penataan Pembagian Urusan Pemerintahan antar Tingkat Pemerintahan							62,9
a.	Penataan Urusan Pemerintahan Daerah dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Terselenggaranya penguatan dan pemantapan urusan pemerintahan daerah pada aspek pelaksanaan dan pengembangan urusan pemerintahan daerah, serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan.	Jumlah kebijakan penyempurnaan pembagian urusan pemerintahan antar tingkat pemerintahan dalam revisi UU No. 32 Tahun 2004.	1 Kebijakan	1 Kebijakan ^{K)}	PROGRAM PENGELOLAAN DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH	Kemendagri	62,9
		Jumlah peraturan pemerintah tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, sebagai turunan dari revisi UU No. 32 Tahun 2004.		1 Peraturan Pemerintah ^{K)}				
		Jumlah sosialisasi penyempurnaan pembagian urusan pemerintahan antar tingkat pemerintahan kepada K/L dan Pemerintah Daerah.		1 Paket ^{K)}				
		Persentase pelaksanaan urusan yang telah menjadi kewenangan pemerintahan daerah	-	100%				

NO	FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
I	Penataan Pembagian Urusan Pemerintahan antar Tingkat Pemerintahan							62,9
a.	Penataan Urusan Pemerintahan Daerah dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Terselenggaranya penguatan dan pemantapan urusan pemerintahan daerah pada aspek pelaksanaan dan pengembangan urusan pemerintahan daerah serta evaluasi dan pelaporan	Jumlah kebijakan penyempurnaan pembagian urusan pemerintahan antar tingkat pemerintahan dalam revisi UU No. 32 Tahun 2004. Persentase daerah yang sudah menyelesaikan perda mengenai kewenangan/urusan (wajib dan pilihan) pada pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota. Persentase perda kewenangan/urusan pada pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota yang telah dievaluasi. Jumlah bidang urusan yang telah disusun Norma Standar Prosedur Kriteria (NSPK) oleh K/L dan fasilitasi implementasi	1 Kebijakan 30% 30% 5 bidang urusan	1 Kebijakan ^{K)} 100% 100% 31 bidang urusan	PROGRAM PENGELOLAAN DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH	Kemendagri	62,9
		Terwujudnya harmonisasi peraturan perundang-undangan terkait dengan peraturan perundang-undangan desentralisasi dan otonomi daerah, baik di Pusat maupun antara Pusat dan Daerah dalam rangka reformasi regulasi secara bertahap.	Persentase peraturan perundang-undangan sektoral yang diinventarisasi yang belum sejalan dengan peraturan perundang-undangan desentralisasi dan otonomi daerah di pusat dan di daerah	100%	100%			

NO	FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
I	Penataan Pembagian Urusan Pemerintahan antar Tingkat Pemerintahan							62,9
a.	Penataan Urusan Pemerintahan Daerah dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Terselenggaranya penguatan dan pemantapan urusan pemerintahan daerah pada aspek pelaksanaan dan pengembangan urusan pemerintahan daerah serta evaluasi dan pelaporan	Jumlah kebijakan penyempurnaan pembagian urusan pemerintahan antar tingkat pemerintahan dalam revisi UU No. 32 Tahun 2004. Persentase harmonisasi peraturan perundang-undangan sektoral dengan peraturan perundang-undangan desentralisasi dan otonomi daerah di pusat	1 Kebijakan 20%	1 Kebijakan ^{K)} 60%	PROGRAM PENGELOLAAN DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH	Kemendagri	62,9
II	Penataan Daerah							45,0
a.	Penataan Daerah Otonom dan Otonomi Khusus	Terbitnya UU Keistimewaan DIY Tersusunnya dan terimplementasinya peraturan pelaksana seluruh UU yang mengatur otonomi khusus Terevaluasinya perkembangan Daerah Otonom Baru	Jumlah undang-undang Jumlah peraturan pelaksana turunan UU yang mengatur daerah dengan otonomi khusus Persentase daerah otonom baru (< 3 th) yang dievaluasi	1 UU 3 RPP dan 2 Perpres 100%	1 UU ^{K)} 3 RPP dan 2 Perpres ^{K)} 100%	PROGRAM PENGELOLAAN DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH	Kemendagri	25,0

NO	FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
I	Penataan Pembagian Urusan Pemerintahan antar Tingkat Pemerintahan							62,9
a.	Penataan Urusan Pemerintahan Daerah dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Terselenggaranya penguatan dan pemantapan urusan pemerintahan daerah pada aspek pelaksanaan dan pengembangan urusan pemerintahan	Jumlah kebijakan penyempurnaan pembagian urusan pemerintahan antar tingkat pemerintahan dalam revisi UU No. 32 Tahun 2004.	1 Kebijakan	1 Kebijakan ^{K)}	PROGRAM PENGELOLAAN DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH	Kemendagri	62,9
b.	Penghentian/pembatasan pemekaran wilayah	Terlaksananya seluruh mekanisme pengusulan pemekaran dan penggabungan daerah sesuai dengan PP No. 78 Tahun 2007, dalam rangka penghentian/pembatasan pemekaran wilayah/pembentukan daerah otonom baru.	Jumlah Strategi Dasar Penataan Daerah Persentase evaluasi setiap usulan pemekaran, penggabungan, dan penghapusan daerah sesuai dengan PP. No 78 Tahun 2007 Jumlah daerah otonom baru yang terbentuk berdasarkan usulan Pemerintah	1 paket - -	1 paket ^{K)} 100% 0 (nol)	PROGRAM PENGELOLAAN DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH	Kemendagri	20,0
III	Peningkatan Kerjasama Daerah							141,4
a.	Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja Sama Daerah	Meningkatnya daerah yang menerima manfaat dari kerja sama daerah dalam bidang ekonomi, prasarana dan pelayanan publik	Persentase peningkatan jumlah daerah yang melaksanakan kerja sama daerah dalam bidang ekonomi, prasarana dan pelayanan publik. Persentase jumlah daerah yang menerima manfaat dari kerja sama daerah dalam bidang ekonomi, prasarana dan pelayanan publik. Jumlah sistem database dan sistem monev kerja sama daerah yang disusun	10% 50% -	20% dari jumlah di tahun 2013 75% 1 paket ^{K)}	PROGRAM PENGUATAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM	Kemendagri	141,4

NO	FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
I	Penataan Pembagian Urusan Pemerintahan antar Tingkat Pemerintahan							62,9
a.	Penataan Urusan Pemerintahan Daerah dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Terselenggaranya penguatan dan pemantapan urusan pemerintahan daerah pada aspek pelaksanaan dan pengembangan urusan pemerintahan daerah serta evaluasi dan pelaporan	Jumlah kebijakan penyempurnaan pembagian urusan pemerintahan antar tingkat pemerintahan dalam revisi UU No. 32 Tahun 2004. Jumlah pemetaan pelaksanaan kerja sama daerah baik yang sukses maupun yang gagal Jumlah pemuktahiran pemetaan tentang pelaksanaan kerja sama daerah baik yang sukses maupun yang gagal	1 Kebijakan	1 Kebijakan ^{K)} 1 paket ^{K)} 2 paket ^{K)}	PROGRAM PENGELOLAAN DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH	Kemendagri	62,9
		Meningkatnya kerjasama antar daerah	Persentase jumlah kegiatan fasilitasi kerjasama antar daerah yang diusulkan	75%	75%			
		Tersusunnya regulasi Pusat tentang administrasi pelayanan terpadu di tingkat kecamatan	Jumlah permendagri tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan.	1 Permendagri	1 Permendagri ^{K)}			
		Terlaksananya administrasi pelayanan terpadu di tingkat kecamatan.	Persentase kabupaten/kota yang telah melaksanakan pelayanan administrasi terpadu kecamatan	10% kabupaten/kota	50% kabupaten/kota			
IV	Pengawasan dan Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah							82,5

NO	FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
I	Penataan Pembagian Urusan Pemerintahan antar Tingkat Pemerintahan							62,9
a.	Penataan Urusan Pemerintahan Daerah dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Terselenggaranya penguatan dan pemantapan urusan pemerintahan daerah pada aspek pelaksanaan dan pengembangan urusan pemerintahan daerah, serta evaluasi dan pelaksanaan	Jumlah kebijakan penyempurnaan pembagian urusan pemerintahan antar tingkat pemerintahan dalam revisi UU No. 32 Tahun 2004.	1 Kebijakan	1 Kebijakan ^{K)}	PROGRAM PENGELOLAAN DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH	Kemendagri	62,9
a.	Pengembangan Kapasitas dan Evaluasi Kinerja Daerah	Terevaluasinya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	Persentase daerah yang dievaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan	100%	100%	PROGRAM PENGELOLAAN DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH	Kemendagri	60,5
		Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai tindak lanjut dari pengawasan dan evaluasi kinerja pemerintahan daerah	Persentase daerah yang meningkat kinerja pemerintahan daerahnya dalam penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah	60%	90%			
b.	Penataan Produk Hukum dan Pelayanan Bantuan Hukum Departemen	Percepatan harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan di tingkat Pusat dan daerah hingga tercapai keselarasan arah dalam implementasi pembangunan.	Jumlah perda yang dikaji	3.000 perda	20.000 perda ^{K)}	PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA DEPARTEMEN DALAM NEGERI	Kemendagri	12,5

NO	FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
I	Penataan Pembagian Urusan Pemerintahan antar Tingkat Pemerintahan							62,9
a.	Penataan Urusan Pemerintahan Daerah dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Terselenggaranya penguatan dan pemantapan urusan pemerintahan daerah pada aspek pelaksanaan dan pengembangan urusan pemerintahan	Jumlah kebijakan penyempurnaan pembagian urusan pemerintahan antar tingkat pemerintahan dalam revisi UU No. 32 Tahun 2004.	1 Kebijakan	1 Kebijakan ^{K)}	PROGRAM PENGELOLAAN DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH	Kemendagri	62,9
c.	Penyusunan Peraturan Perundangan Pemerintahan Daerah	Terselenggaranya dukungan pelayanan teknis dan administrasi berkualitas di lingkungan Direktorat Jenderal Otonomi Daerah	Jumlah penetapan UU tentang pemerintahan daerah sebagai revisi UU No. 32 Tahun 2004	1 UU	1 UU ^{K)}	PROGRAM PENGELOLAAN DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH	Kemendagri	9,5
			Persentase penyelesaian penyusunan peraturan pelaksanaan UU hasil revisi UU No. 32 Tahun 2004		100%			
			Jumlah sosialisasi peraturan bidang otonomi daerah	1 paket	5 paket ^{K)}			
TOTAL								331,8

Keterangan :

^{K)} Angka kumulatif 5 tahun (2010-2014)

**BIDANG PEMBANGUNAN
PRIORITAS BIDANG**

**: WILAYAH DAN TATA RUANG
: Perbaikan Tata Kelola dan Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Daerah**

NO	FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
I	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah dan DPRD							44,7
a.	Penataan Kelembagaan, Ketatalaksanaan, Analisis Jabatan, dan Pelaporan Kinerja	Tersusunnya peraturan pemerintah pengganti PP No. 41 Tahun 2007 dan peraturan-peraturan pelaksanaannya agar organisasi perangkat daerah dapat efektif dan efisien dalam melaksanakan seluruh SPM yang telah ditetapkan serta mengharmoniskan dengan amanat perundang-undangan sektor dalam pembentukan organisasi sektor di daerah.	Jumlah evaluasi pelaksanaan PP No. 41 Tahun 2007	1 paket	1 paket	PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA DEPARTEMEN DALAM NEGERI	Kemendagri	6,0
		Jumlah pengesahan PP pengganti PP No. 41 Tahun 2007			1 PP ^{K)}			
		Persentase daerah yang melaksanakan PP pengganti PP No. 41 Tahun 2007			100%			
		Jumlah laporan monitoring pelaksanaan PP pengganti PP No. 41 Tahun 2007			2 laporan ^{K)}			
		Jumlah laporan evaluasi pelaksanaan PP pengganti PP No. 41 Tahun 2007			1 laporan ^{K)}			
b.	Penerapan Indikator Utama Pelayanan Publik di Daerah	Meningkatnya Implementasi Urusan Pemerintahan Daerah dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Daerah.	Jumlah Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah diterapkan oleh Daerah	5 SPM	17 SPM	PROGRAM PENGELOLAAN DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH	Kemendagri	20,0
		Jumlah bidang SPM yang dimonitor penerapannya		-	17 bidang SPM ^{K)}			

NO	FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
I	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah dan DPRD							44,7
a.	Penataan Kelembagaan, Ketatalaksanaan, Analisis Jabatan, dan Pelaporan Kinerja	Tersusunnya peraturan pemerintah pengganti PP No. 41 Tahun 2007 dan peraturan-peraturan pelaksanaannya agar organisasi perangkat daerah dapat efektif dan efisien dalam melaksanakan seluruh SPM yang telah ditetapkan serta	Jumlah evaluasi pelaksanaan PP No. 41 Tahun 2007	1 paket	1 paket	PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA DEPARTEMEN DALAM NEGERI	Kemendagri	6,0
		Jumlah bidang SPM yang dievaluasi penerapannya	-	17 bidang SPM ^{K)}				
c.	Pembinaan administrasi pejabat negara di daerah dan DPRD	Kapasitas kepala daerah dan pimpinan DPRD yang memadai dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	Jumlah kepala daerah dan pimpinan DPRD yang mengikuti kegiatan orientasi bagi peningkatan kemampuan dalam menjalankan fungsi-fungsi kepemimpinan daerah, legislasi, penganggaran, dan pengawasan, serta inovasi pemerintahan dan pembangunan.	Kepala daerah 5 kabupaten/kota terpilih di setiap provinsi pada 33 provinsi.	Kepala daerah di ^{K)} 478 kabupaten/kota otonom.	PROGRAM PENGELOLAAN DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH	Kemendagri	18,7
			Pimpinan DPRD 5 kabupaten/ kota terpilih di setiap provinsi pada 33 provinsi.	Pimpinan DPRD ^{K)} di 491 kabupaten/kota otonom				
			Kepala daerah provinsi pada 33 provinsi.	Kepala daerah ^{K)} provinsi pada 33 provinsi.				

NO	FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
I	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah dan DPRD							44,7
a.	Penataan Kelembagaan, Ketatalaksanaan, Analisis Jabatan, dan Pelaporan Kinerja	Tersusunnya peraturan pemerintah pengganti PP No. 41 Tahun 2007 dan peraturan-peraturan pelaksanaannya agar organisasi perangkat daerah dapat efektif dan efisien dalam melaksanakan seluruh SPM yang telah ditetapkan serta	Jumlah evaluasi pelaksanaan PP No. 41 Tahun 2007	1 paket	1 paket	PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA DEPARTEMEN DALAM NEGERI	Kemendagri	6,0
			Pimpinan DPRD provinsi pada 33 provinsi.	Kepala daerah dan pimpinan DPRD provinsi pada 33 provinsi.				
		Jumlah laporan evaluasi terhadap peningkatan kapasitas kepala daerah dan DPRD		1 paket				
		Meningkatnya kualitas Perda yang berasal dari usul inisiatif DPRD	Jumlah perwakilan dari masing-masing komisi DPRD yang mengikuti diklat <i>Regulatory Impact Assesment</i> (RIA) atau harmonisasi peraturan perundangan.	Perwakilan dari masing-masing komisi DPRD di 5 kabupaten/kota terpilih di setiap provinsi pada 33 provinsi.	Perwakilan dari masing-masing komisi DPRD di 491 Kab/Kota			
		Jumlah laporan evaluasi kualitas Perda yang berasal dari usul inisiatif DPRD			1 paket			

NO	FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
I	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah dan DPRD							44,7
a.	Penataan Kelembagaan, Ketatalaksanaan, Analisis Jabatan, dan Pelaporan Kinerja	Tersusunnya peraturan pemerintah pengganti PP No. 41 Tahun 2007 dan peraturan-peraturan pelaksanaannya agar organisasi perangkat daerah dapat efektif dan efisien dalam melaksanakan seluruh SPM yang telah ditetapkan serta	Jumlah evaluasi pelaksanaan PP No. 41 Tahun 2007	1 paket	1 paket	PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA DEPARTEMEN DALAM NEGERI	Kemendagri	6,0
II	Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah dan Anggota DPRD							42,3
a.	Pendidikan dan Pelatihan Bidang Pemerintahan dan Politik	Terintegrasinya seluruh diklat bagi PNS Daerah untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan, politik dan penerapan SPM di daerah	Jumlah Grand Strategy penyelenggaraan diklat	1	1 ^{K)}	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN	Kemendagri	42,3
			Jumlah sosialisasi Grand Strategy penyelenggaraan diklat		1 paket ^{K)}			
			Jumlah daerah pelaksana Grand Strategy penyelenggaraan diklat		33 provinsi			
			Jumlah camat peserta diklat teknis pemerintahan	150	510 ^{K)}			
			Jumlah provinsi/angkatan diklat penguatan pemerintahan dan politik bagi anggota DPRD, pejabat pemerintahan Provinsi dan Kabupaten dan Kota, Kecamatan, Kelurahan dan Desa untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan, politik dan SPM		33 Provinsi (52 Angkatan) ^{K)}			
			Jumlah peserta orientasi pengenalan tugas bagi anggota DPRD hasil Pemilu 2014		3.000 ^{K)}			
			Jumlah angkatan diklat calon camat		3 ^{K)}			

NO	FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
I	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah dan DPRD							44,7
a.	Penataan Kelembagaan, Ketatalaksanaan, Analisis Jabatan, dan Pelaporan Kinerja	Tersusunnya peraturan pemerintah pengganti PP No. 41 Tahun 2007 dan peraturan-peraturan pelaksanaannya agar organisasi perangkat daerah dapat efektif dan efisien dalam melaksanakan seluruh SPM yang telah ditetapkan serta	Jumlah evaluasi pelaksanaan PP No. 41 Tahun 2007	1 paket	1 paket	PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA DEPARTEMEN DALAM NEGERI	Kemendagri	6,0
III	Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah							96,2
a.	Pembinaan dan Fasilitasi Dana Perimbangan	Peningkatan efektifitas pemanfaatan DAK sesuai Petunjuk Pelaksanaan	Persentase provinsi, kab/kota yang telah memanfaatkan DAK sesuai Petunjuk Pelaksanaan	70%	90%	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH	Kemendagri	15,1
		Optimalisasi penyerapan DAK oleh daerah	Persentase daerah yang telah Optimal (100%) menyerap DAK	70%	90%			
		Terwujudnya tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan	Jumlah rekomendasi kebijakan untuk dukungan materi sebagai masukan terhadap revisi UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah.	1 paket rekomendasi kebijakan	1 paket rekomendasi kebijakan ^{KJ}			
		Tersusunnya kebijakan/regulasi di bidang fasilitasi dana perimbangan yang dapat diimplementasikan di daerah	Jumlah Permendagri	6	18 ^{KJ}			
			Jumlah Surat Edaran Mendagri	2 SE	6 SE ^{KJ}			

NO	FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
I	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah dan DPRD							44,7
a.	Penataan Kelembagaan, Ketatalaksanaan, Analisis Jabatan, dan Pelaporan Kinerja	Tersusunnya peraturan pemerintah pengganti PP No. 41 Tahun 2007 dan peraturan-peraturan pelaksanaannya agar organisasi perangkat daerah dapat efektif dan efisien dalam melaksanakan seluruh SPM yang telah ditetapkan serta	Jumlah evaluasi pelaksanaan PP No. 41 Tahun 2007	1 paket	1 paket	PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA DEPARTEMEN DALAM NEGERI	Kemendagri	6,0
b.	Pembinaan Administrasi Anggaran Daerah	Peningkatan kualitas belanja daerah dalam APBD	Persentase kab/kota yang proporsi belanja langsungnya lebih besar dari belanja tidak langsung	30%	60%	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH	Kemendagri	37,6
			Persentase rata-rata belanja modal terhadap total belanja daerah (Propinsi)	26%	30%			
		Penetapan APBD secara tepat waktu	Persentase jumlah APBD yang disahkan secara tepat waktu.	60%	90%			
c.	Pembinaan Administrasi Pendapatan dan Investasi Daerah	Meningkatnya pendapatan daerah yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah	Persentase rata-rata perolehan pajak dan retribusi daerah terhadap APBD Kab/Kota daerah	4,60%	11,80%	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH	Kemendagri	22,5
			Persentase rata-rata perolehan pajak dan retribusi daerah terhadap APBD Provinsi	44,50%	48%			
		Meningkatnya Optimalisasi investasi daerah dan pengelolaan barang milik daerah	Persentase rata-rata hasil penerimaan investasi dan barang milik daerah terhadap PAD	3%	7%			
d.	Pembinaan dan Fasilitasi Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah	Provinsi dan kabupaten/ kota memiliki Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) berstatus Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).	Persentase daerah provinsi, kab/kota ber-LKPD dengan status WTP.	15%	100%	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH	Kemendagri	21,0

NO	FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
I	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah dan DPRD							44,7
a.	Penataan Kelembagaan, Ketatalaksanaan, Analisis Jabatan, dan Pelaporan Kinerja	Tersusunnya peraturan pemerintah pengganti PP No. 41 Tahun 2007 dan peraturan-peraturan pelaksanaannya agar organisasi perangkat daerah dapat efektif dan efisien dalam melaksanakan seluruh SPM yang telah ditetapkan serta	Jumlah evaluasi pelaksanaan PP No. 41 Tahun 2007	1 paket	1 paket	PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA DEPARTEMEN DALAM NEGERI	Kemendagri	6,0
		Penetapan dan penyampaian Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD secara tepat waktu	Persentase penetapan dan penyampaian Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang disahkan secara tepat waktu.	40%	90%			
TOTAL								183,3

Keterangan :

^{K)} Angka kumulatif 5 tahun (2010-2014)



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2010
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH NASIONAL
(RPJMN)
TAHUN 2010--2014**

**BUKU II
MEMPERKUAT SINERGI ANTARBIDANG PEMBANGUNAN**

**BAB X
SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP**

**Diperbanyak Oleh:
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS)
2010**



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
BAB X BIDANG SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP	II.10-1
10.1 Kondisi Umum	II.10-2
10.1.1 Peningkatan Ketahanan Pangan dan Revitalisasi Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan	II.10-2
10.1.2 Peningkatan Ketahanan dan Kemandirian Energi.....	II.10-9
10.1.3 Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Mineral dan Pertambangan.....	II.10-12
10.1.4 Perbaikan Kualitas Lingkungan Hidup	II.10-15
10.1.5 Peningkatan Konservasi dan Rehabilitasi Sumber Daya Hutan	II.10-18
10.1.6 Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan	II.10-21
10.1.7 Peningkatan Kualitas Informasi Iklim dan Bencana Alam serta Kapasitas Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim.....	II.10-25
10.2 Permasalahan dan Sasaran.....	II.10-26
10.2.1 Permasalahan	II.10-26
10.2.1.1 Peningkatan Ketahanan Pangan dan Revitalisasi Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan	II.10-27
10.2.1.2 Peningkatan Ketahanan dan Kemandirian Energi	II.10-30
10.2.1.3 Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Mineral dan Pertambangan	II.10-32
10.2.1.4 Perbaikan Kualitas Lingkungan Hidup.....	II.10-34
10.2.1.5 Peningkatan Konservasi dan Rehabilitasi Sumber Daya Hutan.....	II.10-35
10.2.1.6 Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan.....	II.10-36
10.2.1.7 Peningkatan Kualitas Informasi Iklim dan Bencana Iklim serta Kapasitas Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim	II.10-38
10.2.2 Sasaran.....	II.10-39
10.2.2.1 Peningkatan Ketahanan Pangan dan Revitalisasi Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan	II.10-39
10.2.2.2 Peningkatan Ketahanan dan Kemandirian Energi	II.10-41
10.2.2.3 Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Mineral dan Pertambangan	II.10-42
10.2.2.4 Perbaikan Kualitas Lingkungan Hidup.....	II.10-43
10.2.2.5 Peningkatan Konservasi dan Rehabilitasi	

Sumber Daya Hutan	II.10-43
10.2.2.6 Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan.....	II.10-43
10.2.2.7 Peningkatan Kualitas Informasi Iklim dan Bencana Alam serta Kapasitas Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim.....	II.10-44
10.3 Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan.....	II.10-44
10.3.1 Peningkatan Ketahanan Pangan dan Revitalisasi Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan	II.10-47
10.3.2 Peningkatan Ketahanan dan Kemandirian Energi.....	II.10-49
10.3.3 Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Mineral dan Pertambangan	II.10-52
10.3.4 Perbaikan Kualitas Lingkungan Hidup	II.10-53
10.3.5 Peningkatan Konservasi dan Rehabilitasi Sumber Daya Hutan	II.10-54
10.3.6 Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan	II.10-55
10.3.7 Peningkatan Kualitas Informasi Iklim dan Bencana Alam serta Kapasitas Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim.....	II.10-56



BAB X

BIDANG SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP

Peranan sumber daya alam dan lingkungan hidup (SDA dan LH) sangat penting dalam pembangunan nasional, baik sebagai penyedia bahan baku bagi pembangunan ekonomi maupun sebagai pendukung sistem kehidupan. Sesuai dengan fungsinya tersebut, SDA dan LH perlu dikelola dengan bijaksana agar pembangunan serta keberlangsungan kehidupan manusia dapat terjaga dan lestari saat ini dan di masa yang akan datang.

Sebagai pendukung pertumbuhan ekonomi, adanya kepentingan ekonomi yang berorientasi jangka pendek serta lonjakan jumlah penduduk akan berimplikasi pada meningkatnya kebutuhan akan sumber daya alam untuk bahan baku industri maupun konsumsi. Peningkatan kebutuhan tersebut dapat berakibat pada peningkatan pemanfaatan sumber daya alam, yang pada akhirnya akan menurunkan daya dukung dan fungsi dari lingkungan hidup serta kerusakan sumber daya alamnya. Akibat terjadinya degradasi lingkungan hidup ini sudah mulai dirasakan, terutama timbulnya permasalahan pemenuhan kebutuhan pangan, energi serta kebutuhan akan sumber daya air di berbagai wilayah. Sebagai negara kepulauan, wilayah Indonesia yang sebagian besar (75 persen wilayah) berupa lautan, merupakan negara yang sangat rentan terhadap dampak terjadinya perubahan iklim global disamping masalah lonjakan jumlah penduduk; sehingga kedua hal itu perlu diintegrasikan dalam kebijakan pembangunan jangka menengah ke depan (2010-2014).

Sesuai dengan amanat RPJMN pertama (periode 2004 – 2009), lingkup pembangunan bidang SDA dan LH meliputi 1) revitalisasi pertanian, dan 2) perbaikan pengelolaan SDA dan perbaikan fungsi LH. Pelaksanaan dari kebijakan ini memberikan hasil terhadap meningkatnya peran SDA dan LH dalam perkembangan perekonomian nasional. Hal ini dicerminkan dengan semakin meningkatnya kontribusi Produk Domestik Bruto (PDB) dari sektor-sektor yang berbasis SDA dan LH terhadap pembentukan PDB nasional selama periode tersebut. Selain itu, sektor-sektor yang berbasis SDA dan LH juga menjadi tumpuan utama bagi sebagian besar tenaga kerja, terutama di perdesaan dan pesisir.

Sementara itu, pengelolaan SDA dan LH terus dilakukan untuk meningkatkan kualitas dan kelestarian lingkungan hidup. Upaya ini dilakukan melalui peningkatan kualitas sumber daya air, rehabilitasi dan konservasi hutan dan lahan, pengelolaan sumber daya kelautan, serta peningkatan kualitas daya dukung lingkungan hidup. Dengan semakin meningkatnya isu perubahan iklim global, upaya adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim terus meningkat selama periode tersebut.

10.1 Kondisi Umum

Dalam lima tahun ke depan (2010–2014), pembangunan SDA dan LH masih terus diarahkan kepada dua kelompok (cluster), yaitu (i) pemanfaatan SDA yang mendukung pembangunan ekonomi, dan (ii) peningkatan kualitas dan kelestarian LH. Pemanfaatan SDA dalam mendukung pembangunan ekonomi dijabarkan pada tiga prioritas, yaitu (1) Peningkatan Ketahanan Pangan, Revitalisasi Pertanian, Perikanan dan Kehutanan; (2) Peningkatan Ketahanan dan Kemandirian Energi; dan (3) Peningkatan pengelolaan Sumber Daya Mineral dan Pertambangan. Kemudian pembangunan SDA dan LH untuk meningkatkan kualitas dan kelestarian LH ditekankan pada empat prioritas, yaitu (4) perbaikan kualitas lingkungan hidup; (5) peningkatan konservasi dan rehabilitasi sumber daya hutan; (6) peningkatan pengelolaan sumber daya kelautan; (7) peningkatan kualitas informasi iklim dan bencana alam serta kapasitas adaptasi dan mitigasi perubahan iklim

10.1.1 Peningkatan Ketahanan Pangan dan Revitalisasi Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan

Ketahanan pangan nasional merupakan pondasi utama pembangunan nasional lima tahun ke depan. Kondisi ketahanan pangan nasional yang akan dicapai adalah terpenuhinya kebutuhan pangan yang cukup, bergizi seimbang, dan terjangkau bagi seluruh masyarakat. Pencapaian ketahanan pangan nasional memerlukan dukungan penuh dari revitalisasi pertanian, perikanan, dan kehutanan. Sementara itu, revitalisasi pertanian, perikanan, dan kehutanan juga dilaksanakan untuk menciptakan nilai tambah dan meningkatkan daya saing di pasar global secara efisien dan modern untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam lima tahun terakhir, kinerja pembangunan ketahanan pangan menunjukkan kecenderungan yang semakin baik. Hal ini ditunjukkan oleh beberapa indikator, seperti peningkatan produksi pangan, penjagaan stabilitas harga pangan pokok, peningkatan kualitas dan keragaman konsumsi, dan peningkatan status gizi yang secara umum semakin membaik.

Dalam kurun waktu 2005–2008, produksi komoditas pangan penting mengalami peningkatan yang cukup tinggi dan dapat memperkuat aspek ketersediaan pangan dari dalam negeri. Produksi padi, jagung, kedele, dan gula, masing-masing meningkat rata-rata 2,8 persen, 10,4 persen, 3,6 persen, dan 4,4 persen per tahun. Pada tahun 2009, produksi padi diperkirakan akan mencapai 62,6 juta ton gabah kering giling (GKG), jagung sekitar 17,0 juta ton, dan kedele sebesar 924,5 ribu ton. Dalam periode waktu tersebut, produksi pangan sumber protein hewani juga meningkat, yaitu daging 2,2 persen per tahun, telur 7,5 persen per tahun, dan susu 1,4 persen per tahun. Produksi perikanan sebagai sumber protein hewani lainnya dalam kurun waktu tersebut juga mengalami peningkatan yang cukup signifikan yang mencapai rata-rata 8,24 persen per tahun. Perkembangan produksi beberapa komoditas pangan disajikan dalam Tabel 10.1.

TABEL 10.1
PERKEMBANGAN PRODUKSI BEBERAPA KOMODITAS BAHAN PANGAN
2005-2009

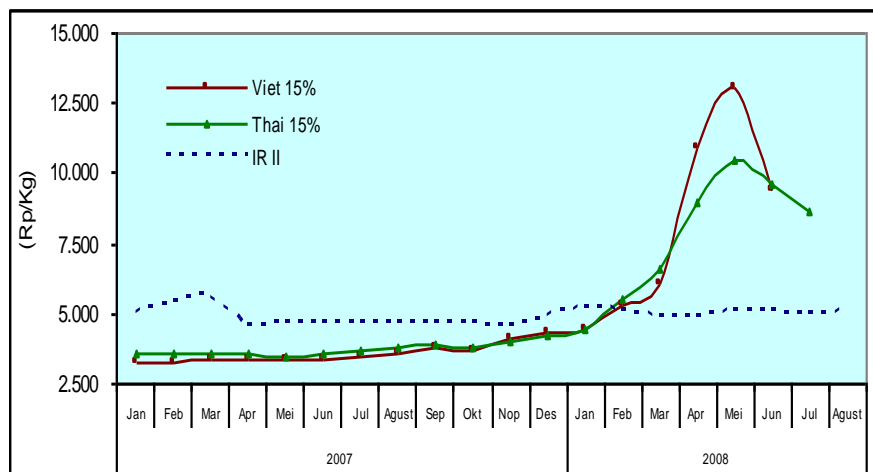
Komoditas	2005	2006	2007	2008	2009*)
Padi (juta ton GKG)	54,2	54,6	57,1	60,3	62,6
(juta ton)	12,5	11,6	13,3	16,3	17,0
Kedele (ribu ton)	808,4	747,6	592,5	776,5	924,5
Tebu (juta ton)	2,2	2,3	2,6	2,8	2,9
Daging (juta ton)	1,8	2,1	2,1	2,1	2,2
Perikanan (juta ton)	6,9	7,5	8,2	8,7	10,5

Keterangan: *) angka sementara/perkiraan

Sumber: BPS, Kementerian Pertanian, serta Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Peningkatan produksi pangan dalam negeri tersebut telah mendorong terjaganya stabilitas harga pangan pada tingkat yang terjangkau oleh masyarakat. Pada tahun 2008, ketika harga beras di tingkat internasional berfluktuasi dan meningkat tajam, harga beras dalam negeri relatif stabil (Gambar 10.1). Secara umum, ketersediaan pangan telah pula menjangkau ke seluruh wilayah Indonesia meskipun untuk beberapa daerah terpencil dan pulau-pulau kecil masih menghadapi beberapa kendala terutama dukungan infrastruktur yang belum optimal.

GAMBAR 10.1
PERKEMBANGAN HARGA BERAS DALAM NEGERI DAN INTERNASIONAL



Sumber : Kementerian Perdagangan

Peningkatan produksi pangan dalam kurun waktu 2005–2008 telah mampu meningkatkan ketersediaan karbohidrat (energi) dan protein bagi masyarakat. Produksi itu telah melebihi tingkat ketersediaan yang direkomendasikan dalam Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi (WNPG) VIII. Tingkat kecukupan konsumsi pangan yang direkomendasikan adalah untuk energi sebesar 2.000 kkal/kapita/hari dan untuk protein 52 gram/kapita/hari. Pada tahun 2007, tingkat ketersediaan energi mencapai sebesar 3.737 kkal/kapita/hari, sementara konsumsi energi rata-rata penduduk Indonesia adalah sebesar 2.025 kkal/kapita/hari. Pada tahun yang sama, tingkat ketersediaan protein (sekitar 83,65 gram/kapita/hari) juga telah melebihi angka konsumsi protein rata-rata sebesar 56,7 gram/kapita/hari. Membaiknya kondisi ketersediaan dan konsumsi pangan masyarakat tersebut berpengaruh pula pada peningkatan kualitas konsumsi pangan yang ditunjukkan oleh peningkatan skor Pola Pangan Harapan (PPH) dari 74,9 pada tahun 2006 menjadi sebesar 82,9 pada tahun 2007.

Salah satu sumber protein hewani yang banyak tersedia di Indonesia adalah ikan. Selain harganya terjangkau, ikan juga mempunyai kandungan gizi serta asam amino yang sangat penting untuk kesehatan. Selama periode 2004–2008, ketersediaan ikan untuk konsumsi juga meningkat sebesar 7,35 persen dari 22,58kg/kapita/tahun pada tahun 2004 menjadi 29,98 kg/kapita/tahun pada tahun 2008. Peningkatan ini disebabkan oleh peningkatan produksi, pengembangan informasi dan promosi pemasaran hasil perikanan di dalam negeri, diantaranya peningkatan kampanye gerakan “gemar makan ikan”.

Selain berperan penting dalam pembangunan ketahanan pangan nasional, sektor pertanian, perikanan, dan kehutanan (PPK) juga berkontribusi penting dalam perekonomian nasional terutama kontribusi untuk produk domestik bruto (PDB), penyerapan tenaga kerja, serta pembentukan devisa negara.

Secara umum, kontribusi PDB sektor PPK terus meningkat, kecuali pada kontribusi PDB subsektor kehutanan yang mengalami penurunan. Dalam periode 2005—2009 rata-rata pertumbuhan PDB sektor PPK sekitar 3,6 persen per tahun (Tabel 10.2.). Angka ini telah melampaui sasaran RPJMN, yaitu rata-rata pertumbuhan sekitar 3,52 persen per tahun. Meskipun total PDB sektor PPK semakin meningkat, kontribusinya terhadap PDB nasional terus mengalami penurunan, yaitu dari 14,9 persen pada tahun 2004 menjadi 13,7 persen pada tahun 2008.

TABEL 10.2
PERTUMBUHAN PDB SEKTOR PERTANIAN DAN SUBSEKTOINYA, 2005-2009

Uraian	2005	2006	2007	2008	Rata- Rata 2005— 2008	2009*	Rata- Rata 2005— 2009*
Pertanian	2,7	3,4	3,5	4,8	3,6	3,5	3,6
1) Tanaman Bahan Makanan	2,6	3,0	3,5	5,4	3,6	3,1	3,5
2) Tanaman Perkebunan	2,6	3,8	3,5	4,8	3,7	6,0	4,1
3) Peternakan & Hasilnya	2,0	3,4	3,3	3,0	2,9	3,0	2,9
4) Kehutanan	-1,3	-2,9	-1,7	-0,6	-1,5	-1,6	-1,6
5) Perikanan	2,7	2,5	2,3	4,4	3,0	5,1	3,4

Sumber: Diolah dari BPS

Pertumbuhan PDB sektor PPK didukung oleh peningkatan produksi berbagai komoditas pertanian, perikanan, dan kehutanan. Sebagaimana telah diuraikan di atas, produksi komoditas tanaman bahan makanan mengalami peningkatan selama periode 2005—2008. Sementara itu, komoditas hortikultura dalam periode 2005—2009 juga mengalami peningkatan, antara lain jeruk 9,4 persen per tahun, mangga 9,7 per tahun, dan anggrek 55,2 persen per tahun. Beberapa komoditas perkebunan dalam periode 2005—2009 juga mengalami peningkatan, antara lain minyak sawit sebesar 13,5 persen per tahun, karet sebesar 5,3 persen per tahun, dan tebu/gula sebesar 6,9 persen per tahun. Selain itu, produksi daging meningkat rata-rata sekitar 2,7 persen per tahun, telur sekitar 7,5 persen per tahun, dan susu sekitar 1,4 persen per tahun.

Untuk subsektor peternakan, produksi daging, baik daging sapi, kerbau, kambing, domba, maupun ayam ras, mengalami peningkatan rata-rata mencapai 2,7 persen per tahun dalam periode 2005—2008. Dalam periode yang sama, produksi telur meningkat rata-rata 7,5 persen per tahun dan produksi susu sebesar 1,4 persen per tahun. Pada tahun 2008, produksi daging diperkirakan mencapai 2,1 juta ton, telur mencapai 1,5 juta ton, dan susu sebesar 574,4 ribu ton.

Untuk subsektor perikanan, produksi perikanan pada kurun waktu 2005–2008 meningkat, yaitu dari 6,87 juta ton menjadi 8,71 juta ton atau rata-rata meningkat sebesar 8,2 persen. Kenaikan produksi tersebut diperoleh terutama dari peningkatan produksi perikanan budidaya, di samping dari perikanan tangkap. Produksi perikanan budidaya meningkat rata-rata sebesar 21,9 persen dengan komoditas utama adalah rumput laut (*seaweeds*), udang (*shrimp*), ikan mas, nila, kepiting (*crab*), lele, patin (*catfish*) dan lainnya. Peningkatan produksi perikanan tangkap mencapai rata-rata sebesar 1,9 persen per tahun dengan komoditas utama, yaitu tuna dan lain-lain. Hal ini

menunjukkan bahwa kebijakan yang mengalihkan produksi dari perikanan tangkap ke perikanan budidaya serta peningkatan pemberdayaan masyarakat selama ini cukup membuahkan hasil.

Untuk subsektor kehutanan, selama periode 2005–2008 tingkat pertumbuhan produksi kayu bulat dari hutan produksi rata-rata sebesar 9,9 persen per tahun, terutama dari produksi kayu bulat hutan tanaman. Produksi kayu bulat mencapai titik terendah pada tahun 2006 yaitu sebesar 20,81 juta m³, jika dibandingkan dengan produksi pada tahun 2008 yang mencapai 31,9 juta m³. Produksi kayu olahan yang terdiri atas kayu lapis, kayu gergajian, *wood working*, *blockboard*, *veneer*, *particle board*, dan lain-lain, mencapai titik tertinggi pada tahun 2007, dengan jumlah produksi total sebesar 10,47 juta m³. Perincian jumlah produksinya adalah bahwa kayu lapis 3,4 juta m³, kayu gergajian 525,29 ribu m³, dan *blockboard* 204,07 ribu m³. Sedangkan produksi *veneer* mencapai puncaknya pada tahun 2005 sebesar 1,01 juta m³.

TABEL 10.3
TOTAL PRODUKSI KAYU BULAT DAN PERTUKANGAN
TAHUN 2005–2008 (JUTA M³)

No.	Komoditas	2005	2006	2007	2008
1	Produksi Kayu Bulat	22,91	20,81	30,16	31,98
2	Produksi HTI Pulp dan Pertukangan	9,65	9,10	10,47	9,37

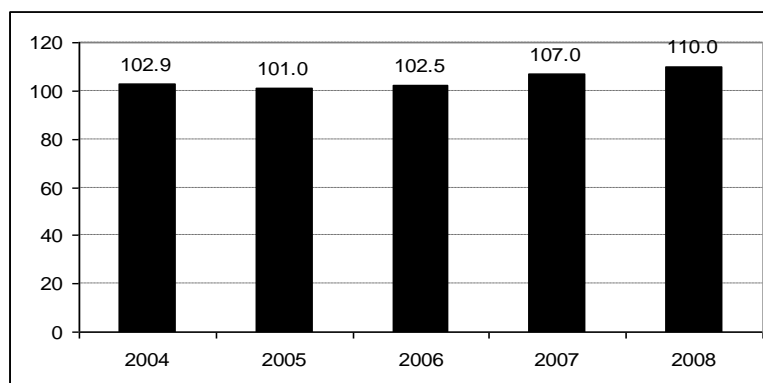
Sumber : Direktorat Jenderal BPK, Kementerian Kehutanan, 2008

Sementara itu, dalam periode 2005 – 2008 produksi hasil hutan bukan kayu (HHBK) masih relatif rendah. Produksi lebah madu sebanyak 6.830 ton, gaharu sebanyak 525.000 kg, rotan sebanyak 437.138 ton, gondorukem sebanyak 69.593 ton, damar sebanyak 23.588 ton dan terpentin sebanyak 16.532 ton.

Dalam hubungan dengan aspek ketenagakerjaan, jumlah dan pangsa tenaga kerja di sektor PPK masih tinggi. Selama periode 2005 – 2008, jumlah tenaga kerja di sektor PPK terus meningkat dengan pertumbuhan rata-rata 2,9 persen per tahun. Pada tahun 2008, jumlah tenaga kerja di sektor PPK diperkirakan mencapai sekitar 42,7 juta orang, dengan pangsa sekitar 43,7 persen dari tenaga kerja nasional.

Perkembangan rata-rata produktivitas tenaga kerja, Nilai Tukar Petani, dan Nilai Tukar Nelayan juga meningkat. Rata-rata produktivitas tenaga kerja di sektor PPK meningkat sekitar 1,6 persen per tahun. Selain itu, selama periode 2005 – 2008, NTP rata-rata meningkat sebesar 1,7 persen per tahun. Pada tahun 2008, NTP dan NTN diperkirakan dapat mencapai masing-masing 110,0 dan 103,9.

GAMBAR 10.2
PERKEMBANGAN INDEKS NILAI TUKAR PETANI (NTP), 2004—2008



S

Sumber: Diolah dari BPS

Sektor PPK juga berperan penting dalam menyumbang devisa negara melalui penyediaan komoditas perdagangan internasional. Beberapa komoditas di subsektor perkebunan dan perikanan Indonesia telah mampu bersaing di pasar global. Indonesia merupakan produsen utama dunia dari beberapa komoditas perkebunan, antara lain produksi kelapa sawit (nomor 2 terbesar dunia setelah Malaysia), minyak kelapa (nomor 2 setelah Filipina), lada (nomor 3 setelah Vietnam dan Malaysia), kakao (nomor 3 setelah Pantai Gading dan Ghana), dan kopi (nomor 4 setelah Brasil, Vietnam, dan Kolombia). Kemudian untuk perikanan, komoditas ekspor utama adalah tuna, udang, mutiara, dan rumput laut. Indonesia merupakan *fishing ground* tuna dan produsen rumput laut terbesar di dunia.

Dalam kurun waktu 2005—2008 nilai ekspor komoditas pertanian secara keseluruhan meningkat rata-rata sebesar 14,4 persen per tahun. Pada tahun 2008, nilai ekspor terbesar dicapai oleh minyak sawit sekitar USD 12,9 miliar, kopi sebesar USD 980,4 juta, biji kakao sebesar USD 766,1 juta, rempah-rempah sebesar USD 329,3 juta, dan buah-buahan sebesar USD 129,5 juta. Komoditas hasil pertanian yang nilai ekspornya meningkat cukup tinggi adalah kopi sebesar 39,3 persen per tahun, karet sebesar 23,0 persen per tahun, rempah-rempah sebesar 22,7 persen per tahun, dan biji kakao sebesar 20,6 persen per tahun.

Selanjutnya untuk perikanan, pada periode 2005–2008 nilai ekspor komoditas perikanan mengalami kenaikan rata-rata sebesar 10,22 persen, yaitu dari US\$ 1,91 miliar pada tahun 2005 menjadi US\$ 2,56 miliar pada tahun 2008. Namun, volume ekspor perikanan hanya meningkat sebesar 1,73 persen, dari 0,856 juta ton pada tahun 2005 menjadi 0,91 juta ton pada tahun 2008. Peningkatan nilai ekspor perikanan tersebut terjadi yaitu karena terjadi peningkatan harga komoditas perikanan yang

cukup signifikan sebagai akibat adanya peningkatan mutu ekspor hasil perikanan, berkurangnya hambatan tarif ekspor ke beberapa negara tujuan ekspor, seperti Jepang, peningkatan kerja sama bilateral dan regional, serta adanya promosi produk perikanan di luar negeri. Sampai saat ini, tujuan utama ekspor hasil perikanan adalah Jepang, Hongkong, Singapura, Malaysia, Korea Selatan, Thailand, Filipina, Taiwan, Amerika Serikat, dan Uni Eropa. Pada periode yang sama, investasi di sektor perikanan mencapai 6 proyek PMDN dengan nilai Rp8,2 miliar dan 20 proyek PMA dengan nilai US\$ 65,7 juta. Total investasi ini diperkirakan masih di bawah 1 persen terhadap investasi nasional.

Untuk kehutanan, nilai ekspor produk kayu dan turunannya terus mengalami kenaikan. Pada tahun 2001 nilai ekspor mencapai US\$ 2,6 miliar dan meningkat menjadi US\$ 2,8 miliar pada tahun 2007. Kontribusi terbesar ekspor produk kayu berasal dari kayu lapis. Walaupun terdapat kecenderungan penurunan, pada tahun 2001 ekspor kayu lapis mencapai US\$ 1,8 miliar dan menurun menjadi US\$ 1,4 miliar pada tahun 2007. Komoditi yang mengalami kenaikan nilai ekspor antara lain *wood charcoal*, *verner sheet*, *fibreboard*, dan *pulp*. Nilai ekspor kayu gergajian dan *particle board* pada tahun 2005 dan 2007 juga mengalami penurunan.

TABEL 10.4
PERKEMBANGAN NILAI EKSPOR BEBERAPA KOMODITAS PERTANIAN,
PERIKANAN, DAN KEHUTANAN (DALAM JUTA USD)

Komoditas	2004	2005	2006	2007	2008
1. Minyak Sawit	3.441,8	3.756,3	4.817,4	3.657,7	10.510,6
2. Getah Karet	14,7	6,4	11,3	12,3	14,5
3. Kopi	281,5	497,7	491,2	633,7	850,5
4. The	64,8	48,0	42,7	73,2	79
5. Rempah-rempah	153,7	138,0	158,5	258,5	313,2
6. Tembakau	45,6	62,9	50,9	56,6	61,8
7. Biji Coklat	370,2	468,2	491,8	623,1	746,5
8. Udang	892,5	948,1	1.115,9	1.029,9	1.220,4
9. Tuna/Cakalang	243,9	245,4	250,6	304,3	337,9
10. Mutiara	5,9	10,7	13,4	12,6	12,7
11. Damar	16,8	16,7	24,1	37,2	50,8

Sumber: BPS dan Kementerian

10.1.2 Peningkatan Ketahanan dan Kemandirian Energi

Minyak bumi, gas bumi, dan batubara mempunyai peranan besar sebagai sumber energi untuk mendukung berbagai kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat. Selain sebagai pendukung pembangunan ekonomi, ketiga komoditas energi tersebut juga berperan sebagai sumber penerimaan devisa negara yang sangat penting. Pada kurun waktu tahun 2004-2008 kontribusi dalam penerimaan APBN berkisar antara 25-32 persen. Pada tahun 2008, pendapatan dari minyak dan gas bumi mencapai Rp. 304,4 trilyun atau sekitar 31,6% dari pendapatan pemerintah, dan dari pertambangan umum sebesar Rp. 41,7 trilyun (4,4%). Sehingga secara total, sektor energi dan pertambangan umum memberikan kontribusi sebesar Rp. 349,5 trilyun terhadap penerimaan negara, atau sekitar 36,3%.

Disamping sebagai sumber devisa, minyak dan gas bumi, serta batubara juga mempunyai peranan yang besar dalam memasok energi/bahan bakar dan bahan baku industri di dalam negeri (lihat Tabel 10.5). Untuk menjamin kebutuhan energi di dalam negeri, terus dilakukan optimasi produksi minyak dan gas bumi, serta batubara. Sejak tahun 2004 Indonesia telah berubah dari pengeksportir minyak menjadi *net oil importer*. Namun, dengan adanya penemuan cadangan baru, seperti di lapangan minyak Blok Cepu, dalam waktu lima tahun ke depan akan terjadi kembali peningkatan produksi minyak mentah.

TABEL 10.5
CADANGAN, PRODUKSI, INVESTASI MIGAS, MINERAL DAN BATUBARA SERTA PERANAN MINYAK BUMI DALAM PENYEDIAAN ENERGI NASIONAL

		Satuan	2004	2005	2006	2007	2008
Cadangan Energi Primer	Minyak Bumi	Milyar Barel	8,61	8.62	8.92	8.40	8.21
	Gas Bumi	Trilyun Kaki Kubik (TSCF)	188,34	185,8	187,09	164,99	170,07
	Batubara	Milyar Ton	7,0	6,8	9,5	18,7	20,98
Produksi Energi Primer	Produksi Minyak Mentah	ribu barel/hari	1.095	1.062	1.006	954	977
	Produksi Gas	TSCF/hari	8.301	8.180	8.093	7.686	7.883
	Produksi Batubara	juta ton	132	153	194	217	229

		Satuan	2004	2005	2006	2007	2008
Investasi	Minyak dan gas bumi	Milyar USD	5,9	8,3	9,6	11,2	13,5
	Mineral, Batubara dan Panas Bumi	Milyar USD	1	0,9	1,4	1,2	1,6
Minyak Bumi dalam Penyediaan Energi Nasional		%	57	44,9	55	51	48,4

Sumber: Kementerian ESDM

Pada tahun 2008, sebanyak 60% dari total produksi minyak mentah dimanfaatkan untuk keperluan Bahan Bakar Minyak (BBM) dalam negeri, dan sisanya diekspor. Namun pasokan minyak mentah ini masih belum cukup untuk memenuhi permintaan BBM nasional, yakni sebesar 1.038 barel per hari. Sehingga masih diperlukan impor minyak mentah dan BBM. Pada tahun 2008, untuk memenuhi kebutuhan BBM dalam negeri, sebanyak 247 barel per hari minyak mentah dan sebanyak 423 barel per hari BBM dipasok dari pasar internasional.

Gas bumi telah dimanfaatkan oleh industri pupuk, baja, kilang petrokimia, LPG (*Liquefied Petroleum Gas*), dan sebagainya. Pada tahun 2008, sebanyak 47,8% dari total produksi gas bumi sebesar 7.883 juta kaki kubik per hari (MMSCFD), telah dimanfaatkan untuk kebutuhan di dalam negeri, terutama untuk keperluan bahan baku. Sebagian besar dari gas bumi yang diproduksi masih diekspor ke Jepang, Taiwan dan Korea dalam bentuk LNG, dan sebagian diekspor melalui pipa ke Singapura dan Malaysia. Pemanfaatan gas untuk memenuhi keperluan dalam negeri akan semakin meningkat dengan adanya beberapa Perjanjian Jual Beli Gas Bumi yang ditandatangani dalam kurun waktu 2002-2008, sesudah UU No. 22/2001 tentang Minyak dan Gas Bumi diterbitkan.

Walaupun pemanfaatan batubara untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri relatif masih kecil dibandingkan untuk ekspor, peranan batubara dalam sumber energi didalam negeri semakin penting, dimana sekitar 25% dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.

Untuk mengurangi ketergantungan akan impor minyak mentah dan BBM, produksi dan cadangan minyak dan gas bumi terus ditingkatkan dengan memperbaiki iklim investasi eksplorasi dan eksploitasi. Pada tahun 2008, cadangan minyak bumi mencapai 8,21 milyar barel. Apabila diproduksi sesuai dengan tingkat produktivitas saat



ini, yakni 0,357 milyar barel per tahun, maka cadangan ini diperkirakan akan bertahan selama 23 tahun. Cadangan gas bumi sebesar 170 trilyun kaki kubik (TSCF) dan dengan tingkat produksi saat ini mencapai 2,9 TSCF per tahun, maka cadangan diperkirakan akan bertahan selama 62 tahun. Cadangan batubara sebesar 20,98 miliar ton, dengan tingkat penambangan seperti saat ini, yakni sekitar 200 juta ton per tahun, maka cadangan ini diperkirakan akan bertahan selama 82 tahun.

Selain upaya-upaya peningkatan produksi minyak dan gas bumi, guna menjamin pasokan energi di dalam negeri, upaya-upaya penganekaragaman (diversifikasi) sumber energi lainnya, selain minyak bumi, terus dilakukan. Upaya-upaya ini antara lain adalah pemanfaatan gas dan batubara, serta energi baru terbarukan (EBT) untuk pembangkit listrik, seperti pembangkit listrik tenaga panas bumi, tenaga surya dan angin, mikrohidro, dan sebagainya, serta bahan bakar alternatif non-BBM, seperti bahan bakar nabati (BBN) dan batubara cair dan gas (*liquefied* dan *gasified coal*).

Penambahan kapasitas terutama dari pembangkit listrik tenaga panas bumi, yakni 852 MW (2005) dan 1.052 MW (2008). Kapasitas terpasang energi tenaga surya pada tahun 2008 sebesar 12,1 MW, dan tenaga angin sebesar 1,1 MW. Pemanfaatan BBN pada tahun 2008 mencapai 2.558,7 ribu kilo liter (KL), yang terdiri dari bio-diesel sebanyak 2.329,1 ribu KL, bio-ethanol sebanyak 192,4 KL, dan bio-oil sebanyak 37,2 ribu KL. Pemanfaatan BBN ini meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, yakni 1.722 ribu KL (2007), 471,5 ribu KL (2006), dan 122,5 ribu KL (2005). Guna mempercepat pemanfaatan EBT, program Desa Energi Mandiri (DME) telah dikembangkan guna memanfaatkan EBT potensi setempat.

Potensi EBT terbesar adalah air (*hydro*), yakni sebesar 75.670 MW. Namun pada tahun 2008, hanya sekitar 4.200 MW atau sekitar 5% dari potensial yang ada baru dimanfaatkan. Upaya pemanfaatan energi air ini terus dilakukan, terutama melalui akuisisi teknologi mikrohidro (50 kW-500kW) yang telah berkembang, dan dimanfaatkan dalam memenuhi kebutuhan listrik di pedesaan. Saat ini, kapasitas terpasang minihidro dan mikrohidro telah mencapai 86,1 MW dari 500 MW sumber daya yang tersedia.

Potensi EBT terbesar kedua adalah panas bumi, dengan total potensi panas bumi sekitar 27 GW. Potensi terbesar panas bumi ditemukan di Sumatera, Jawa, Bali, dan sisanya tersebar di Nusa Tenggara Timur, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Dari potensi sebesar ini yang dimanfaatkan baru sebesar 4%, yaitu PLTP di Kamojang, Lahendong, Dieng, Gunung Salak, Darajat, Sarula, Sibayak dan Wayang Windu. Potensi sumber energi biomassa juga cukup besar dan diperkirakan mencapai 50.000 MW, yang sampai saat ini hampir belum dikelola. Di samping itu, bahan baku BBN cukup bervariasi dan tersedia dengan jumlah yang cukup melimpah, seperti kelapa sawit, jarak, jagung, tebu, ubi, dan aren. Ketersediaan bahan mentah yang melimpah ini membuat BBN akan menjadi salah satu fokus utama dalam pemanfaatan EBT di tahun-tahun yang akan datang.

Di samping peningkatan produksi minyak dan gas bumi, serta upaya penganekaragaman energi, efisiensi dalam penyediaan dan pemanfaatan energi terus dilakukan. Pada tahun 2008, intensitas energi, yakni rasio antara konsumsi energi final dengan produk domestik bruto (PDB), menunjukkan angka yang masih cukup tinggi/boros, yakni 382 TOE per juta US\$ PDB. Walaupun demikian upaya-upaya ke arah efisiensi telah dilakukan terutama melalui gerakan penghematan, seperti promosi penggunaan lampu hemat energi, dan sebagainya. Di samping gerakan penghematan, upaya mitigasi untuk mengurangi emisi gas rumah kaca (CO₂) telah dilakukan. Upaya-upaya itu antara lain adalah dengan dicanangkannya program percepatan pembangkit listrik 10,000 MW tahap kedua, yang sebagian besar sumber energinya berbasis panas bumi, EBT dengan tingkat emisi CO₂ yang sangat rendah, penggantian BBM dengan CNG (*Compressed Natural Gas*) untuk kendaraan umum di perkotaan, dsb.

Untuk menjamin penyediaan energi dengan harga yang terjangkau, subsidi BBM dan listrik telah diterapkan. Di samping itu, sejak tahun 2007 subsidi LPG mulai diterapkan seiring dengan diselenggarakannya gerakan konversi minyak tanah ke LPG. Pada tahun 2008, subsidi BBM/LPG mencapai Rp. 140 trilyun dan subsidi listrik mencapai Rp. 84 trilyun, sehingga secara total subsidi energi pada tahun 2008 mencapai Rp. 224 trilyun. Subsidi ini merupakan subsidi yang tertinggi yang pernah diterapkan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, Rp. 121 trilyun (2007), Rp. 98 trilyun (2006), Rp. 113 trilyun (2005), dan Rp. 92 trilyun (2004), hal disebabkan terutama oleh tingginya harga minyak mentah dan BBM impor. Dalam kurun waktu itu pula, volume minyak tanah bersubsidi secara bertahap telah dikurangi, seiring dengan diterapkannya gerakan konversi minyak tanah ke LPG. Pada tahun 2008, telah dilakukan pengalihan penggunaan minyak tanah sebesar 2,069 juta KL.

10.1.3 Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Mineral dan Pertambangan

Sampai saat ini telah dicapai berbagai hasil dan kemajuan di sektor pertambangan mineral dan batubara. Hasil ini merupakan tumpuan yang kuat untuk memasuki pembangunan jangka menengah mendatang.

Pada bulan Desember 2008, telah diterbitkan Undang-Undang (UU) No. 4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, untuk menggantikan UU No. 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan. Perubahan mendasar menurut UU ini adalah berubahnya bentuk pengelolaan sumber daya mineral dan pertambangan dari rezim kontrak menjadi rezim perizinan, dan pengakuan adanya kegiatan pertambangan rakyat dalam suatu wilayah pertambangan. Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota diberi kewenangan untuk mengeluarkan izin pertambangan di wilayahnya. Di samping itu, UU ini juga mengamatkan adanya peningkatan nilai tambah dari bahan tambang dengan mewajibkan perusahaan tambang yang sudah berproduksi untuk membangun pabrik pengolahan di dalam negeri.



Dalam lima tahun terakhir ini, penerimaan negara dari pertambangan umum mengalami peningkatan tiap tahunnya. Pada tahun 2004 penerimaan tersebut sebesar Rp. 8.933,3 miliar meningkat menjadi Rp. 42.120,8 miliar pada tahun 2008. Dalam periode yang sama, investasi pertambangan umum mengalami pasang surut, di mana sempat mengalami penurunan pada tahun 2005 dan 2007. Penurunan ini terutama disebabkan oleh kurang mendukungnya iklim investasi sebagai akibat adanya konflik fungsi lahan dan ketidakpastian regulasi. Pada tahun 2004 nilai investasi sebesar Rp 1 miliar US\$ dan mencapai Rp 1,6 miliar US\$ pada tahun 2008.

Sejumlah peta dan informasi geologi mengenai potensi sumber daya mineral dan energi telah diselesaikan. Pemetaan geologi bersistem, telah diselesaikan seluruhnya, terdiri 58 lembar peta geologi dengan skala 1:100.000 untuk Pulau Jawa dan Madura, 162 lembar dengan skala 1:250.000 untuk daerah di luar Pulau Jawa dan Madura. Pemetaan gaya berat bersistem di Pulau Jawa dan Madura dengan skala 1:100.000 telah diselesaikan sebanyak 49 lembar, sedangkan untuk luar Pulau Jawa dan Madura dengan skala 1:250.000 telah selesai sebanyak 75 lembar. Bersamaan dengan itu, pemetaan geologi dasar laut bersistem skala 1:250.000 telah diselesaikan sebanyak 17 lembar, peta geologi kelautan regional dengan skala 1:1.000.000.

Sebanyak 74 lembar peta hidrogeologi bersistem di luar Pulau Jawa dan Madura skala 1:250.000, sedangkan untuk Pulau Jawa dan Madura peta skala 1:100.000 telah diselesaikan sebanyak 5 lembar. Penyelidikan potensi cekungan air tanah tingkat awal telah menyelesaikan 105 cekungan atau 49,1 persen, dan penyelidikan tahap rinci sebanyak 22 cekungan atau 10,3 persen dari seluruh cekungan air tanah di Indonesia.

Di samping itu, telah diselesaikan pemetaan geokimia mineral skala 1:250.000 sebanyak 38 lembar, inventarisasi sumber daya mineral skala 1:250.000 sebanyak 50 lembar, dan peta penyebaran potensi panas bumi dengan skala 1:5.000.000; pemetaan geologi panas bumi skala 1:50.000 telah diselesaikan di 52 lokasi; penyelidikan geofisika panas bumi di 29 lokasi; penyelidikan geokimia panas bumi di 19 lokasi; dan pengeboran uji panas bumi di 2 lokasi. Bersamaan dengan itu, diselesaikan pula inventarisasi batubara skala 1:250.000 sebanyak 23 lembar atau sekitar 46,0 persen dari seluruh wilayah Indonesia yang mengandung batubara.

Sampai dengan tahun 2008 telah selesai penaksiran cadangan batubara Indonesia, yaitu sebesar 20,98 miliar ton dengan sumber daya sebesar 104,8 miliar ton. Cadangan tersebut terutama tersebar di Pulau Sumatera sebesar 60% dan Pulau Kalimantan 35%, sedangkan sisanya tersebar di Pulau Jawa, Pulau Sulawesi, dan Papua.

Kegiatan eksplorasi telah menghasilkan data perkiraan cadangan sumber daya mineral logam, antara lain meliputi timah 2 juta ton, nikel 901,2 juta ton, bauksit 924,4 juta ton, emas 1,7 ribu ton, dan perak 8,7 ribu ton. Untuk sumber daya mineral industri: batu kapur 30 miliar ton, dolomit 1,5 miliar ton, kaolin 9,3 juta ton, pasir kuarsa 4,7 miliar ton, belerang 5,7 juta ton, fosfat 4,3 juta ton, bentonit 1,4 miliar ton, feldspar 2,5 miliar ton, zeolit 207 juta ton, pirofilit 550 juta ton, granit 10 miliar ton, dan marmer 8,6

miliar ton, sedangkan potensi sumber daya energi panas bumi diperkirakan 27.510 MW.

Produksi bauksit sampai saat ini masih dipusatkan pada penambangan cadangan bijih berkualitas ekspor di Pulau Bintan dan sekitarnya, dengan pasaran ekspor utama ke Jepang. Cadangan bauksit yang jauh lebih besar terdapat di daerah Kalimantan Barat. Sampai saat ini seluruh produksi konsentrat tembaga masih diekspor karena belum tersedia pabrik peleburan tembaga di dalam negeri.

Pemasaran batubara di dalam negeri dan ekspor selama 2004-2008 menunjukkan perkembangan yang cukup baik. Sebagian besar pemasaran batubara di dalam negeri diserap oleh pembangkit listrik tenaga uap, industri semen, industri tekstil, industri pulp, pabrik peleburan nikel dan timah, serta berbagai industri kecil lainnya. Tingkat pemasaran batubara di dalam negeri juga meningkat dari 32,8 juta ton (2004) menjadi 75,4 juta ton (2008). Adapun ekspor meningkat, dari 93,3 juta ton (2004) menjadi 158,3 juta ton (2008).

Bahan-bahan tambang/galian lainnya, adalah bahan galian industri, seperti batu kapur, dolomit, belerang, kaolin, pasir kuarsa, fosfat, bentonit, feldspar, dan marmer juga produksinya mengalami peningkatan. Pertumbuhan sektor industri yang semakin meningkat telah memacu pengembangan pertambangan bahan galian ini, terutama dalam usaha memenuhi kebutuhan bahan baku industri tersebut. Produksi beberapa jenis komoditi mineral mulai 2004-2008 dapat dilihat pada Tabel 10.6 di bawah ini.

TABEL 10.6
PRODUKSI BEBERAPA KOMODITI MINERAL NASIONAL

JenisKomoditi Mineral	Satuan	2004	2005	2006	2007	2008
Emas	ton	92,94	143,3	85,41	117,73	63,59
Perak	ton	262,94	323,42	261,4	269,38	225,67
Tembaga	ton	840,32	1.063,85	817,8	797,61	655,06
Bauksit	ribu mt	1.330,80	1.441,90	1.500,30	15.406,00	1.498,60
Bijih Besi	ribu mt	70	62,5	240,3	1.894,80	3.965,00
Bijih Nikel	ribu ton	4.095	4.081	4.354	6.623	14.902
Fero Nikel	ribu ton	39.538	33.864	14.474	18.532	18.700
Logam Timah	ribu ton	60,7	67,6	65,36	91,28	71,61

Sumber: Kementerian ESDM

10.1.4 Perbaikan Kualitas Lingkungan Hidup.

Pembangunan bidang lingkungan hidup dilaksanakan untuk dapat mencegah dan mengantisipasi akibat yang ditimbulkan oleh kegiatan-kegiatan pembangunan dan pemanfaatan sumber daya alam. Meningkatnya kasus pencemaran lingkungan dan penurunan daya dukung lingkungan diantaranya diakibatkan oleh laju pertumbuhan penduduk, pembangunan infrastruktur, industrialisasi, pola kehidupan yang konsumtif, lemahnya penegakan hukum, serta belum optimalnya kapasitas sumber daya manusia.

Persoalan lain yang dilakukan dalam pembangunan lingkungan hidup adalah antisipasi terhadap perubahan iklim. Indonesia sebagai negara tropis dan kepulauan, dikategorikan sebagai salah satu negara yang rentan terhadap perubahan iklim. Dampak perubahan iklim sudah menjadi ancaman yang cukup serius bagi lingkungan. Tanda-tanda dari dampak perubahan iklim di Indonesia dapat dilihat dari adanya kenaikan temperatur udara, perubahan curah hujan, kenaikan permukaan air laut, dan perubahan musim yang ekstrim. Kondisi ini menyebabkan terjadinya bencana kekeringan, banjir, longsor, dan bencana alam lainnya.

Untuk mengatasi dan meminimalkan dampak aktivitas pembangunan dan perubahan iklim tersebut terhadap lingkungan dalam Pembangunan Jangka Menengah 2004-2009 telah dilaksanakan berbagai kegiatan pengelolaan lingkungan hidup yang mengarah kepada 4 program prioritas, yaitu: 1) Program Perlindungan dan Konservasi

Sumber Daya Alam; 2) Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup; 3) Program Peningkatan Kualitas serta Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup; dan 4) Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan. Berikut ini uraian pencapaian masing-masing program tersebut.

Dalam program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam dilakukan berbagai upaya, diantaranya adalah melaksanakan identifikasi kerusakan dan rehabilitasi daerah penyangga Taman Nasional Bukit Tigapuluh (TNBT) seluas 20 Ha; menyusun Model Pengelolaan Daerah Penyangga Kawasan Konservasi; terbentuknya Balai Kliring Keanekaragaman Hayati, dan melaksanakan penandatanganan kerjasama dalam jejaring informasi dengan Pemerintah Daerah DIY dan Sumatera Utara; mengintegrasikan pertimbangan-pertimbangan lingkungan hidup dalam perencanaan pembangunan dan penataan ruang wilayah, rekomendasi kebijakan pemanfaatan ruang pulau berdasarkan daya dukung lingkungan, dan koordinasi penyiapan instrumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis; dan terlaksananya Program Menuju Indonesia Hijau (MIH).

Dalam program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup telah dilaksanakan berbagai upaya seperti menyusun, menyempurnakan, dan mengkaji peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup, meratifikasi konvensi internasional di bidang lingkungan hidup dan instrumennya, mengalokasikan DAK pada 434 kabupaten/ kota dan dana dekonsentrasi lingkungan pada 32 provinsi di tahun 2007, 2008, 2009, meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup untuk menciptakan "*check and balances*" melalui pola kemitraan, kegiatan adiwiyata, kegiatan aliansi strategis masyarakat peduli lingkungan, mengembangkan *Debt for Nature Swaps* (DNS) bidang lingkungan hidup, menyusun panduan ekonomi ekosistem lahan basah, melakukan kajian ekonomi ekosistem terumbu karang dan ekosistem padang lamun; program insentif lingkungan; kerangka *Indonesia Environment Fund Strategy*; dan proposal pendanaan lingkungan dari luar negeri dan integrasi instrumen lingkungan dalam perbankan nasional, serta menyusun buku panduan penyusunan PDRB Hijau.

Selanjutnya, untuk meningkatkan Kapasitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup dilaksanakan berbagai kegiatan pengembangan data dan informasi, seperti penyusunan laporan Status Lingkungan Hidup Indonesia (SLHI) 2004 hingga 2008, evaluasi Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) 2004 hingga 2007, dan kajian status lingkungan 2002 - 2008, pelaksanaan sosialisasi metadata, data warehouse untuk lingkungan hidup, pengumpulan data lingkungan hidup dari sektor dan daerah, pembuatan sistem informasi geografis, laporan analisa kualitas sungai, pembentukan advokasi komunikasi lingkungan dan sinergitas kemitraan dengan Kaukus Lingkungan di DPRD tingkat provinsi, kabupaten dan kota, serta jaringan *Environmental Parliament Watch* (EPW). Penyusunan sistem terintegrasi Neraca Lingkungan dan Ekonomi di tingkat nasional oleh BPS, Pemda Provinsi Sulawesi



Tenggara, dan Pemda Provinsi Lampung, pengembangan sistem informasi terpadu antara sistem jaringan pemantauan kualitas lingkungan hidup nasional dan daerah, dan terlaksananya penandatanganan kerjasama dalam jejaring informasi dengan pemda DIY, Sumatera Utara, penyusunan database Sumber Daya Genetik (SDG) holtikultura dan pedoman CEP (*Communication, Eduviation & Public Awareness*) keanekaragaman hayati.

Upaya Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan juga dilakukan melalui berbagai kegiatan, seperti pengembangan peraturan perundangan lingkungan dalam pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan, seperti disahkannya UU No.18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah pada tanggal 7 Mei 2008, optimalisasi peraturan dan metodologi di bidang pengkajian dampak lingkungan (AMDAL), penerapan kebijakan dan standarisasi lingkungan melalui pengembangan Sistem Manajemen Lingkungan (SML) – penerapan ISO 14001, ecolabel dan Pusat Produksi Bersih Nasional, pelaksanaan pemantauan kualitas air dan udara di beberapa daerah Kabupaten/Kota, penyelenggaraan program langit biru, pengendalian dan pengelolaan pencemaran limbah padat dan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), Proper, Adipura, program perlindungan lapisan ozon, penegakan hukum terpadu dan penyelesaian hukum atas kasus perusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta pembentukan pos pengaduan dan pelayanan penyelesaian sengketa lingkungan hidup.

Khusus pengendalian pencemaran udara telah dilakukan melalui (1) pemasangan peralatan pengamatan kualitas udara yaitu CO dan debu di Jakarta; (2) tersedianya data kandungan timbal (Pb) di udara *ambient* di 10 kota, data terjadinya hujan asam di 7 kota, data kebisingan kendaraan bermotor di 5 kota, Sistem Pemantauan Kualitas Udara Ambien Kontinyu *Air Quality Monitoring System* (AQMS) di 10 kota dan *passive sampler* di 30 kota, dan data sumber pencemar emisi DKI Jakarta dan sumber pencemar Pb di Tangerang; (3) tersedianya 41 jaringan stasiun pemantau kualitas udara; (4) terselenggaranya Program Langit Biru (PLB) yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas udara perkotaan melalui pengendalian pencemaran emisi sumber bergerak khususnya untuk sektor transportasi. Data pada tahun 2007 menunjukkan hasil yang sangat baik, yang ditunjukkan oleh kandungan Pb dalam bensin di kota metropolitan dan besar yang sudah tidak terdeteksi lagi. Untuk kota-kota lainnya masih terdeteksi namun masih di bawah standar, yaitu 0,013 gr/liter; dan (5) terlaksananya Program Perlindungan Lapisan Ozon berupa penghapusan pemakaian bahan perusak lapisan ozon (BPO) untuk aerosol, MAC dan foam sebesar 321 metric ton (MT), dan pendistribusian peralatan untuk semua sektor.

TABEL 10.7
REKAPITULASI DATA INDEKS STANDAR PENCEMARAN UDARA TAHUNAN
2004-2007

No	Kota	Baik / Sehat (hari)				Tidak sehat (hari)				Berbahaya (hari)			
		2004	2005	2006	2007	2004	2005	2006	2007	2004	2005	2006	2007
1	Jakarta	18	29	26	72	12	18	54	49	-	0	0	0
2	Bandung	64	40	14	0	-	0	0	0	-	0	0	0
3	Denpasar	-	-	0	0	-	-	0	0	-		0	0
4	Medan	135	24	15	2	6	0	2	18	-	0	0	2
5	Pekanbaru	60	-	93	8	4	-	0	0	-		0	0
6	Pontianak	30	-	58	4	-	-	4	0	-		0	0
7	Palangka Raya	206	215	229	349	20	7	26	0	5	1	0	0
8	Semarang	60	229	0	14	-	0	0	0	-	0	0	0
9	Surabaya	74	21	25	62	6	4	19	7	-	0	0	0
10	Jambi	-	-	0	0	-	-	0	0	-	-	0	0

Sumber: Diolah dari SLHI, 2004-2007

Sementara itu, dalam rangka pengendalian pencemaran air, telah dilakukan pengadaan data series kualitas air sungai prioritas di 30 provinsi, data kualitas air 6 danau, data kadar POS air dan sedimen di 12 lokasi, dan data kualitas air akibat kegiatan PETI di 4 sungai.

10.1.5 Peningkatan Konservasi dan Rehabilitasi Sumber Daya Hutan

Peningkatan konservasi dan rehabilitasi sumber daya hutan dimaksudkan untuk meningkatkan fungsi dan daya dukung sumber daya hutan dengan berbagai upaya seperti pemantapan kawasan hutan melalui pemantapan tata batas dan penetapan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), optimalisasi hutan produksi, serta peningkatan fungsi dan daya dukung Daerah Aliran Sungai (DAS). Disamping itu, peningkatan konservasi dan rehabilitasi sumber daya hutan ditujukan untuk meningkatkan konservasi keanekaragaman hayati dan perlindungan hutan.

Pada periode 2004-2008 upaya peningkatan konservasi dan rehabilitasi sumber daya hutan telah dilakukan melalui: (1) Penataan batas kawasan; (2) penanggulangan *illegal logging* dan kebakaran hutan, pengembangan jasa lingkungan, dan rehabilitasi hutan dan lahan; (3) peningkatan fungsi dan daya dukung daerah aliran sungai (DAS); dan (4) peningkatan penelitian, ilmu pengetahuan dan teknologi kehutanan.

Dalam rangka penataan batas kawasan hutan hingga saat ini telah diselesaikan penataan batas sepanjang 5.079 km yang difokuskan pada 21 (dua puluh satu) lokasi taman nasional model dan wilayah-wilayah rawan konflik dan perambahan kawasan hutan.



Sejalan dengan penataan penyelesaian batas kawasan hutan tersebut, juga dilakukan *review* Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Hingga saat ini telah diselesaikan *review* RTRW di 5 (lima) provinsi. Penyusunan rancang bangun KPH sampai dengan tahun 2009 telah mencapai 1.066 unit KPH dengan luas 43,9 juta ha, namun hingga saat ini belum ada satupun rancang bangun KPH tersebut yang telah ditetapkan sebagai KPH definitif. Kondisi ini membawa dampak yang cukup signifikan pada pengelolaan hutan yang terkait dengan pelestarian, perlindungan, dan pemanfaatan sumber daya hutan.

Sementara itu, upaya konservasi sumber daya hutan melalui kegiatan pengelolaan kawasan konservasi telah dilaksanakan di 50 taman nasional dan 483 kawasan konservasi lainnya (cagar alam, suaka margasatwa, taman buru dan hutan lindung). Upaya tersebut telah berhasil meningkatkan kelestarian sumber plasma nutfah baik tumbuhan dan satwa di habitatnya serta meningkatkan fungsi penyangga bagi sistem kehidupan di sekitarnya. Dalam kurun waktu 2003 hingga 2007 kawasan konservasi telah bertambah seluas 1.063.894 ha.

Ancaman peningkatan konservasi pada umumnya berasal dari kegiatan *illegal logging* dan kebakaran hutan. Untuk itu, upaya penanggulangan praktek *illegal logging* telah dilakukan antara lain melalui operasi hutan lestari, operasi fungsional, operasi gabungan dan operasi rutin. Operasi tersebut telah berhasil menurunkan angka kasus *illegal logging* di Indonesia dari 720 kasus pada tahun 2005 menjadi 161 kasus pada tahun 2008, serta berhasil menghindari potensi kerugian negara sebanyak Rp 25 triliun per tahun.

Pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dilakukan melalui pembaharuan data sebaran *hotspot* secara berkala, antisipasi secara dini berdasarkan data *hotspot*, peningkatan kesiagaan posko dan patroli kebakaran hutan, dan penguatan kelembagaan pengendali kebakaran hutan. Upaya tersebut telah berhasil mengurangi jumlah *hotspot* di dalam kawasan hutan, namun belum mampu mengurangi jumlah *hotspot* secara maksimal di luar kawasan hutan.

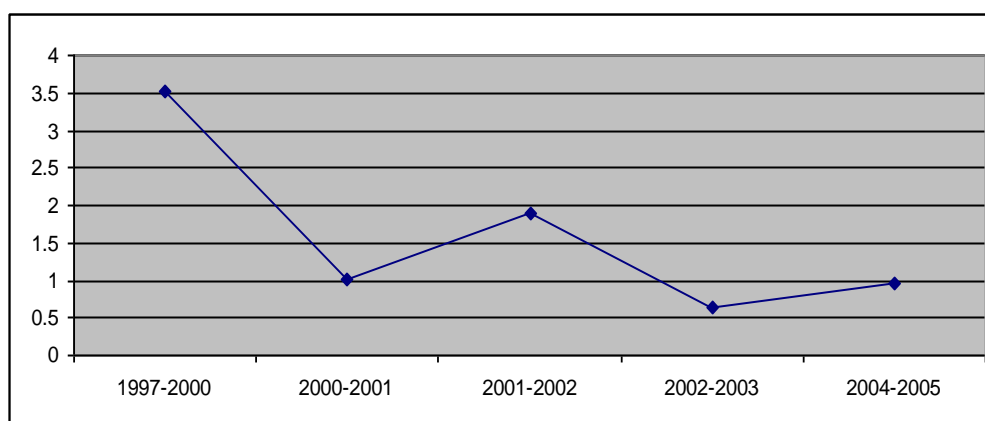
Luas areal yang terbakar (baik di dalam dan di luar kawasan hutan) dari tahun 2004-2009 cenderung mengalami penurunan. Pada tahun 2005-2006, jumlah *hotspot* mencapai titik tertinggi yaitu 146.264 *hotspot*, hal ini dipicu adanya musim kemarau panjang di Indonesia pada periode tersebut. Upaya penanggulangan kebakaran pada tahun 2007 telah berhasil menurunkan tingkat kebakaran sebesar 74 persen dari tahun sebelumnya (menjadi 37.909 *hotspot*). Sampai dengan triwulan ke tiga tahun 2009 jumlah *hotspot* yang terpantau menurun menjadi 31.756 *hotspot*.

Dalam rangka menunjang upaya konservasi hutan maka telah dikembangkan dan ditingkatkan berbagai kegiatan jasa lingkungan dan peningkatan keanekaragaman hayati. Jumlah pemegang Izin Pengusahaan Pariwisata Alam (IPPA) mengalami peningkatan, dari 15 perusahaan pada tahun 2003 menjadi 25 perusahaan pada tahun 2008. Jumlah pengunjung ke kawasan konservasi mengalami peningkatan cukup tajam

dari 800.000 orang pada tahun 2004 menjadi 3.000.000 orang pada tahun 2008. Pengelolaan keanekaragaman hayati melalui aktivitas izin penangkaran tumbuhan dan satwa liar (TSL) juga mengalami peningkatan. Pada tahun 2008, jumlah izin penangkaran TSL dilindungi sejumlah 154 unit, sedangkan untuk TSL yang tidak dilindungi menjadi 52 unit. Penerimaan devisa dari aktivitas ini pada tahun 2008 mencapai Rp.2 triliun.

Dalam rangka mempertahankan dan memulihkan daya dukung Daerah Aliran Sungai (DAS) telah dilakukan upaya rehabilitasi hutan dan lahan melalui berbagai kegiatan. Upaya tersebut telah berhasil menurunkan laju degradasi dan deforestasi hingga 0,9 juta ha/tahun pada tahun 2008. Angka laju deforestasi dan degradasi pada 2 periode sebelumnya yaitu : periode tahun 1997-2000 sebesar 3,51 juta ha/tahun dan periode 2000-2003 sebesar 1,5 juta ha/th.

GAMBAR 10.3
GRAFIK LAJU DEFORESTASI (JUTA HA/TAHUN)



Sumber : Eksekutif Data Strategis Kehutanan, Kementerian Kehutanan, 2008.

Rehabilitasi kawasan hutan dilaksanakan melalui Gerakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan, Hutan Tanaman Industri (HTI), pengayaan oleh Hak Pengusahaan Hutan (HPH), pembangunan model Unit Manajemen Hutan Meranti, Silvikultur Intensif (SILIN) dan rehabilitasi yang dilakukan PT. Perhutani. Hasil rehabilitasi PT. Perhutani hingga tahun 2005 mencapai luas 1.827.900 ha, tahun 2006 menjadi seluas 2.230.010 ha, tahun 2007 menjadi seluas 3.171.709 ha, tahun 2008 menjadi seluas 4.010.673 ha, dan hingga triwulan ke tiga tahun 2009 menjadi 6.607.343 ha. Selain itu, dilakukan upaya-upaya pemberdayaan dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemulihan fungsi dan daya dukung DAS di luar kawasan hutan. Upaya tersebut dilakukan melalui aksi penanaman pohon serentak, gerakan perempuan tanam danelihara, hari menanam pohon, dan kegiatan *one man one tree*.

Dalam rangka mendukung peningkatan dan pemulihan fungsi DAS melalui kegiatan rehabilitasi tersebut telah dibangun 20.000 ha Hutan Kemasyarakatan (HKm) di 10 provinsi, Ijin Usaha Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm) kepada 57



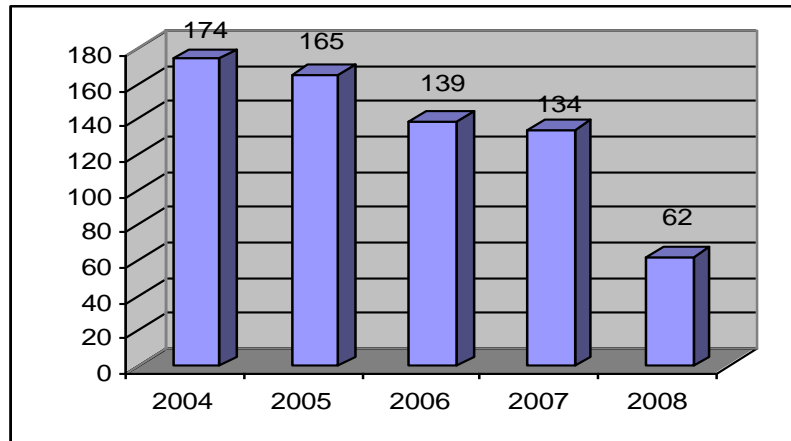
kelompok masyarakat di 19 kabupaten. Selain itu telah ditetapkan areal kerja seluas 176.000 ha untuk 13 provinsi. Selain itu, untuk menanggulangi lahan kritis di luar kawasan hutan telah dibangun hutan rakyat (HR), sampai dengan triwulan ke tiga telah dibangun 2.800.000 ha HR.

10.1.6 Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan

Sumber daya kelautan Indonesia yang terdiri dari pesisir, pulau pulau kecil dan lautan serta biota di dalamnya mempunyai peranan penting bagi pembangunan nasional baik dari aspek ekonomi, sosial, keamanan dan ekologis. Dengan total luas laut Indonesia sekitar 5,8 juta kilometer persegi (km²), yang terdiri dari 2,3 juta km² perairan kepulauan, 0,8 juta km² perairan teritorial, dan 2,7 km² perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, 17.480 pulau dan panjang pantai 95.181 km, dan letaknya yang strategis di antara 2 benua dan menjadi jalur perdagangan dunia yang penting, maka posisi dan letak kepulauan Indonesia yang bersifat *archipelagic*, menjadi sangat penting perannya dalam pembangunan nasional. Ekosistem laut juga sangat berperan penting dalam siklus hidrologi dan keseimbangan alam yang dapat mempengaruhi iklim global. Oleh sebab itu, upaya pengelolaan sumber daya kelautan dimaksudkan untuk meningkatkan manfaat sumber daya kelautan secara optimal dengan tetap memelihara fungsi laut sebagai pendukung sistem kehidupan.

Dalam upaya mengamankan kedaulatan NKRI dan menjaga keberlangsungan sumber daya laut dari berbagai ancaman kerusakan, termasuk *illegal, unreported and unregulated fishing (IUU fishing)* maka peningkatan pengawasan dan keamanan maritim menjadi sangat penting untuk diperhatikan dalam pembangunan kelautan nasional. Sampai dengan tahun 2008, upaya yang telah dilakukan antara lain peningkatan pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan dengan 25 kapal pengawas, operasi bersama, dan pengembangan sistem pengawasan berbasis masyarakat melalui pembentukan 1.369 kelompok masyarakat pengawas. Dalam periode 2004 – 2008 jumlah tindak pidana perikanan menurun dari 174 kasus pada 2004 menjadi 62 kasus pada 2008.

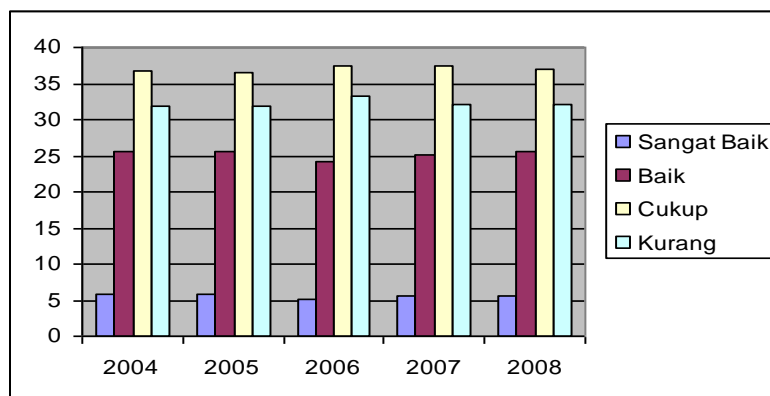
GAMBAR 10.4
PERKEMBANGAN JUMLAH TINDAK PIDANA PERIKANAN



u
Sumber: Kementerian Kelautan dan Perikanan

Indonesia dikenal sebagai salah satu penyumbang kekayaan hayati terumbu karang terbesar di dunia. Dengan luas total sebesar 50.875 km² (*World Resources Institute, 2002*), sekitar 51 % terumbu karang di kawasan Asia Tenggara dan 18 % terumbu karang di dunia, berada di wilayah perairan Indonesia. Untuk itu, diperlukan upaya untuk mempertahankan kualitas ekosistem perairan agar dapat mempertahankan fungsi terumbu karang secara optimal dalam mendukung sistem kehidupan.

GAMBAR 10.5
KONDISI TERUMBU KARANG INDONESIA



Sumber: Kementerian Kelautan dan Perikanan

Sebagai upaya untuk menyelamatkan ekosistem wilayah pesisir dan laut guna menjaga kelestarian sumber daya ikan selama kurun waktu 2005-2009 telah dilakukan



rehabilitasi dan konservasi sumber daya pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil antara lain melalui: (i) Pengelolaan kawasan konservasi laut seluas 13,5 juta hektar, termasuk Kawasan Konservasi Laut Daerah (KKLD); dan (ii) Dilaksanakannya pengelolaan dan rehabilitasi terumbu karang pada 21 kabupaten/kota di 8 provinsi.

Dalam kurun waktu tersebut, upaya peningkatan kerja sama dalam pengelolaan ekosistem pesisir dan laut juga telah dilakukan melalui: (i) Pengembangan kerja sama antarnegara tetangga dalam pengelolaan ekosistem pesisir dan laut seperti *Sulu-Sulawesi Marine Ecoregion* (SSME) dan *Bismarck - South Solomon Marine Ecoregion* (BSSME), *Arafuru and Timor Seas Ecosystem Action* (ATSEA), serta inisiasi *Coral Triangle Initiative* (CTI) yang melibatkan enam negara dalam rangka pelestarian ekosistem terumbu karang di daerah utara dan timur Indonesia dan peningkatan ekonomi di daerah tersebut; (ii) Pengembangan kerja sama regional antar wilayah laut di Selat Karimata, Teluk Tomini, Teluk Bone, dan lain-lain; dan (iii) Pengkajian dan pemacuan stok ikan.

Pada tahun 2009 pemerintah mengesahkan Undang-Undang No. 21 tahun 2009 tentang persetujuan pelaksanaan ketentuan konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang hukum laut tanggal 10 Desember 1982 yang berkaitan dengan konservasi dan pengelolaan sediaan ikan yang beruaya terbatas dan sediaan ikan yang beruaya jauh. Undang-Undang ini selanjutnya dapat menjadi payung dalam pengelolaan sumber daya perikanan yang berkelanjutan.

Selanjutnya, dalam upaya untuk meningkatkan kesadaran dunia akan pentingnya peran pelestarian sumber daya kelautan dan mengantisipasi dampak perubahan iklim, Indonesia menjadi negara penggagas penyelenggaraan *World Ocean Conference 2009* yang menghasilkan *Manado Ocean Declaration* yang disepakati oleh 76 negara untuk memasukkan isu kelautan ke dalam agenda UNFCCC.

Dalam pengembangan dan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, telah dilakukan beberapa upaya pengelolaan secara terpadu dengan menerapkan ICM (*integrated coastal management*), pengesahan produk peraturan perundangan antara lain Undang-Undang Nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, kerja sama pengelolaan wilayah laut dan pesisir antardaerah, pengelolaan pulau-pulau kecil dan pulau-pulau terdepan/terluar, serta pengembangan sumber daya kelautan non konvensional.

Dalam rangka pengelolaan pulau-pulau kecil dan pulau-pulau terdepan/terluar, pada kurun waktu 2005-2008 pemerintah telah mengesahkan Peraturan Presiden Nomor 78 tahun 2005 tentang pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar. Selain itu, telah dilakukan identifikasi, verifikasi, penamaan pulau dan pemberdayaan pulau-pulau kecil terutama pulau terluar melalui pemberian sarana dan prasarana dasar serta pemberdayaan masyarakat. Sampai dengan tahun 2008 jumlah pulau yang telah diverifikasi mencapai sebanyak 10.160 pulau. Pada tahun 2007 telah didaftarkan untuk pertama kalinya sejumlah 4.891 pulau ke PBB melalui *United Nations Group of Experts*

on *Geographical Names* (UNGEGN).

Selain itu, dalam upaya untuk mengurangi tekanan terhadap eksploitasi sumber daya ikan yang berlebihan pemerintah juga telah mengembangkan program pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan nelayan, pembudidaya ikan, dan masyarakat pesisir lainnya. Pada tahun 2005 telah dilakukan program pemberdayaan masyarakat pesisir yang mencakup 206 kabupaten/kota, pada tahun 2006, 2007, dan 2008 masing-masing mencakup 140 kab/kota, 156 kab/kota, dan 115 kab/kota. Pemberdayaan masyarakat pesisir tersebut antara lain ditempuh melalui pelaksanaan pembangunan *Solar Packed Dealer* Nelayan (SPDN), yang sampai dengan tahun 2008 telah mencapai 225 SPDN yang tersebar di 136 kabupaten/kota, pengembangan usaha perikanan tangkap skala kecil melalui optimasi penangkapan, pelelangan, penanganan ikan serta optimasi 4.380 Kelompok Usaha Bersama (KUB).

Selanjutnya, pengembangan sumber daya kelautan non konvensional telah dilakukan melalui pengelolaan barang muatan kapal tenggelam (BMKT), pariwisata bahari, pemanfaatan sumber daya hayati sebagai sumber biotek kelautan, serta pemanfaatan energi laut. Selain untuk mendukung upaya pelestarian, pengkayaan sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan bahari Indonesia, BMKT juga diharapkan dapat memberikan manfaat yang optimal dan seimbang antara ekonomis dan non ekonomis. Sampai saat ini BMKT yang telah diangkat mencapai 34.793 unit benda berharga.

Potensi bioteknologi kelautan dan perikanan berupa senyawa-senyawa bioaktif produk alam (*natural products*) seperti skualen, omega-3, fikokoloid dan biopolimer yang terdapat pada mikro dan makroalgae, mikroorganisme maupun invertebrata sangat tinggi dan banyak terdapat di perairan Indonesia. Berbagai potensi tersebut sampai saat ini belum dimanfaatkan dan dikelola secara optimal, padahal potensi tersebut memiliki prospek yang cerah untuk dikembangkan antara lain untuk keperluan industri makanan sehat, farmasi, kosmetik dan industri berbasis bioteknologi lainnya.

Selain menjadi sumber pangan, laut juga mengandung beraneka sumber daya energi. Energi laut dapat diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu energi panas laut, energi pasang surut, dan energi gelombang. Untuk lautan di wilayah Indonesia, potensi termal $2,5 \times 10^{23}$ joule dengan efisiensi konversi energi panas laut sebesar tiga persen dapat menghasilkan daya sekitar 240.000 MW. Dengan potensi sumber energi yang melimpah, konversi energi panas laut dapat dijadikan alternatif pemenuhan kebutuhan energi listrik di Indonesia. Selain itu, wilayah Indonesia terdiri dari banyak pulau dan memiliki cukup banyak selat sempit serta teluk yang memungkinkan untuk memanfaatkan energi pasang surut.

Dalam pengembangan riset dan Iptek kelautan dan perikanan, pada periode 2005-2008 telah dihasilkan teknologi perbenihan ikan yang berkualitas, pengembangan iptek dan teknologi tepat guna untuk masyarakat (iptekmas), penyebaran peta *fishing ground*, dan pengembangan stasiun pemantauan data-data kelautan.



10.1.7 Peningkatan Kualitas Informasi Iklim dan Bencana Alam serta Kapasitas Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim

Indonesia, sebagai negara tropis dan kepulauan, dikategorikan sebagai salah satu negara yang kaya akan sumber daya alam dan keanekaragaman hayati (*megadiversity country*) namun rentan terhadap perubahan iklim. Kekayaan sumber daya alam dan keanekaragaman hayati di satu sisi dapat menjadi peluang untuk mengurangi dampak perubahan iklim, namun di sisi yang lain juga berpotensi terkena dampak dari perubahan iklim itu sendiri. Saat ini, karena paradigma pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup yang tidak tepat, dampak perubahan iklim sudah menjadi ancaman yang cukup serius bagi lingkungan, bahkan menyebabkan timbulnya berbagai macam bencana. Kurangnya program adaptasi dan mitigasi untuk mengantisipasi kenaikan temperatur udara, curah hujan, kenaikan permukaan air laut, dan perubahan musim yang ekstrim menyebabkan timbulnya kerugian yang besar bagi masyarakat akibat terjadinya bencana kekeringan, banjir, longsor, dan bencana alam lainnya.

Fenomena alam yang terjadi seperti perubahan iklim dan bencana alam yang terjadi tersebut juga menimbulkan konsekuensi yang memperparah penurunan kualitas hidup. Gejala perubahan iklim seperti kenaikan temperatur, perubahan intensitas dan periode hujan, pergeseran musim hujan / kemarau, dan kenaikan muka air laut, akan mengancam daya dukung lingkungan dan kegiatan seluruh sektor pembangunan. Dampak perubahan iklim global pada akhirnya akan berpengaruh signifikan terhadap ketersediaan sumber daya air, ketahanan pangan dan energi yang jika tidak diantisipasi akan memperburuk kinerja pembangunan khususnya sektor sumber daya alam.

Pelaksanaan UNFCCC di Bali pada tahun 2007 merupakan momentum yang memberikan arti kepada langkah Indonesia dalam merespon dampak perubahan iklim tersebut. Mengacu pada konvensi UNFCCC Article 3 para 4, upaya untuk merespon isu perubahan iklim harus diintegrasikan dengan program pembangunan nasional. Sampai saat ini telah dilakukan beberapa upaya perbaikan kerusakan lingkungan yang mengarah kepada upaya adaptasi dan mitigasi dampak perubahan iklim serta meningkatkan penyediaan informasi dini cuaca dan iklim.

Dalam hal kebijakan, Indonesia telah menyusun dokumen Rencana Aksi Nasional untuk Menghadapi Perubahan Iklim, dan dokumen *National Development Planning: Indonesia Responses to Climate Change*. Selanjutnya dilakukan beberapa upaya perbaikan kerusakan lingkungan yang mengarah kepada upaya mitigasi dampak perubahan iklim, serta adaptasi perubahan iklim global dan bencana alam dengan meningkatkan upaya penyediaan informasi dini cuaca dan iklim ekstrim yang secara cepat dapat diterima oleh masyarakat dan frekuensi penyampaian informasi cuaca umum dalam kondisi khusus.

Upaya mitigasi ini ditandai dengan disetujuinya 70 usulan proyek CDM oleh Komnas MPB hingga tahun 2008. Dari 70 usulan proyek tersebut, 21 di antaranya telah diakui oleh PBB dengan terdaftar di *CDM Executive Board*. Dari 20 proyek yang disetujui

Komnas MPB tersebut diharapkan dapat mereduksi emisi sekitar lebih dari 30 juta ton setara CO₂.

TABEL 10.8
PERKEMBANGAN USULAN PROYEK CDM 2005-2009

Status	2005	2006	2007	2008	2009	Total
Disetujui Komnas MBP	5	6	13	46	34 (Juli 2009)	104
Terdaftar di <i>Executive Board CDM</i>	0	8	4	9	2 (Feb 2009)	24

Sumber: KLH, 2009

Dalam penanganan bencana alam, upaya yang telah dilakukan ialah pembangunan sarana dan pengembangan informasi meteorologi, klimatologi, kualitas udara dan geofisika secara komprehensif. Beberapa hasil yang dapat dilihat diantaranya yaitu kecepatan waktu penyediaan informasi gempa bumi dan tsunami saat ini telah mengalami peningkatan yang signifikan, yaitu di bawah 7 menit, penayangan informasi cuaca dan kejadian gempa bumi di media massa dan media elektronika menjadi 4 kali per hari dalam kondisi khusus, penyampaian layanan cuaca penerbangan pada bandar udara, serta layanan cuaca maritim pada pelayaran yang disiarkan melalui radio pantai; penyusunan peta iklim, peta agro klimat (Pulau Jawa), peta iso dan peta curah hujan di seluruh Indonesia; peningkatan akurasi dan kecepatan penyampaian informasi gempa bumi dan peringatan dini tsunami; peningkatan penyebaran dan akses informasi kepada masyarakat, termasuk informasi mitigasi bencana dan potensi sumber daya alam dan lingkungan; peningkatan akurasi dan kecepatan penyampaian informasi gempa bumi dan peringatan dini tsunami; pengembangan sistem informasi dini yang berkaitan dengan dinamika global dan perubahan kondisi alam, seperti gempa bumi, tsunami, banjir dan kekeringan.

10.2 Permasalahan Dan Sasaran

10.2.1 Permasalahan

Sampai saat ini, upaya untuk meningkatkan manfaat SDA dan peningkatan kualitas LH terus dilakukan. Meskipun demikian, permasalahan pemanfaatan SDA yang belum memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan hidup masih dihadapi yang mengakibatkan daya dukung lingkungan menurun dan ketersediaan sumber daya alam semakin menipis. Penurunan kualitas SDA ditunjukkan dengan tingkat eksploitasi hutan yang semakin mengkhawatirkan akibat terjadinya pembalakan liar (*illegal logging*), meluasnya kebakaran hutan dan lahan, penambangan liar, rusaknya wilayah laut akibat penangkapan ikan yang melanggar dan merusak (*illegal and destructive fishing*). Selain



itu, meningkatnya konversi hutan alam, dan meluasnya alih fungsi lahan pertanian dan tambak untuk kegiatan ekonomi lainnya juga mempengaruhi tingkat produksi pangan yang dapat mengancam ketahanan pangan nasional.

Permasalahan yang dihadapi dalam pemanfaatan sumber daya alam untuk mendukung pembangunan ekonomi adalah masih belum optimalnya pemanfaatan sumber daya alam untuk pembangunan. Hal ini ditandai dengan tingginya tingkat eksploitasi sumber daya hutan dan energi untuk pembangunan, masih rendahnya pemanfaatan sumber daya perikanan dibanding potensinya, serta masih kurang optimalnya usaha pertanian, perikanan dan kehutanan dalam mendorong ketahanan pangan dan perekonomian nasional.

10.2.1.1 Peningkatan Ketahanan Pangan dan Revitalisasi Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan

Sektor pertanian mengemban peran penting untuk menyediakan bahan pangan bagi seluruh masyarakat. Ke depan, tantangan dan permasalahan serius yang akan dihadapi adalah memantapkan ketahanan dan kemandirian pangan yang bertumpu pada produksi dalam negeri. Produksi bahan pangan dalam negeri harus dapat mengimbangi atau bahkan melebihi kebutuhan pangan dan kebutuhan bahan baku industri. Permasalahan lain yang dihadapi dalam peningkatan ketahanan pangan adalah kemampuan produksi pangan, pertanian, dan perikanan yang akan menghadapi kendala dan keterbatasan dukungan kapasitas sumber daya alam.

Pada satu sisi, peningkatan permintaan akan bahan pangan terjadi seiring dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk serta meningkatnya daya beli dan selera masyarakat akan bahan pangan, yang dipicu oleh membaiknya kondisi ekonomi dalam lima tahun ke depan. Di sisi lain, penurunan kuantitas dan kualitas sumber daya lahan, tambak dan air, akan menjadi kendala dan keterbatasan dalam meningkatkan kemampuan produksi komoditas pangan. Terjadinya alih fungsi lahan pangan ke non pertanian, degradasi lahan pertanian dan lahan tambak, keterbatasan sarana dan prasarana produksi pertanian dan perikanan, serta dampak negatif dari fenomena perubahan iklim, juga akan menjadi permasalahan lain yang akan mengurangi kemampuan produksi bahan pangan dalam lima tahun ke depan.

Produksi dan produktivitas pertanian, perikanan, dan kehutanan masih perlu terus ditingkatkan. Selain permasalahan dan tantangan yang telah disebutkan di atas, kendala lain yang dihadapi adalah jaminan penyediaan dan aksesibilitas masyarakat pertanian, perikanan, dan kehutanan terhadap input produksi (pakan, pupuk, dan benih). Permasalahan deforestasi, degradasi hutan dan lahan, pemanfaatan potensi yang tidak berkelanjutan (seperti *overfishing* di beberapa wilayah pengelolaan perikanan), serta pemanfaatan potensi sumber daya yang masih belum optimal juga akan menjadi kendala dalam peningkatan produksi dan produktivitas. Peningkatan produksi dan produktivitas juga masih memerlukan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi, baik

dalam aspek input produksi maupun penanggulangan penyakit tumbuhan/tanaman dan kesehatan hewan/ikan, serta teknologi pengolahan kayu di sektor kehutanan. Di sektor kehutanan produksi Hutan Tanaman Industri (HTI) maupun Hutan Rakyat (HR) belum dapat memenuhi kebutuhan kayu untuk industri (di luar *pulp*). Selain itu, keterbatasan sarana dan prasarana pertanian, perikanan, dan kehutanan sangat mempengaruhi upaya peningkatan produksi dan produktivitas. Keterbatasan ketersediaan sarana dan prasarana antara lain, ditunjukkan oleh jumlah pelabuhan dan armada perikanan. Sarana dan Prasarana pelabuhan dan armada perikanan di wilayah Indonesia Timur yang mempunyai beberapa jenis ikan yang bernilai ekonomis tinggi masih belum tersedia secara cukup dibandingkan dengan di wilayah Indonesia Barat. Selain itu, armada perikanan nasional yang masih didominasi oleh kapal ikan skala kecil dengan kemampuan penangkapan yang terbatas berakibat pada rendahnya tingkat produksi perikanan tangkap. Kondisi ini diperparah dengan adanya fenomena perubahan iklim yang menyebabkan semakin kerapnya terjadi badai dan bencana alam lain yang turut menghambat upaya peningkatan produksi dan produktivitas pertanian, perikanan, dan kehutanan.

Selain semakin terbatasnya kemampuan produksi untuk memenuhi permintaan, ketahanan pangan nasional ke depan akan dihadapkan pula pada tantangan dalam menjaga stabilitas harga pangan dan masih belum meratanya aksesibilitas masyarakat terhadap pangan. Sehubungan dengan itu, dalam periode lima tahun ke depan, aksesibilitas masyarakat miskin dan rawan pangan terhadap pangan masih akan menjadi perhatian utama untuk diatasi. Masalah aksesibilitas ini terkait pula dengan perlunya upaya untuk tetap menjaga stabilitas harga pangan domestik, terutama agar terjangkau bagi masyarakat miskin. Stabilisasi harga pangan ini juga akan terkait dengan permasalahan pengelolaan logistik dan distribusi pangan yang harus mampu menjawab permasalahan belum meratanya kemampuan produksi pangan antarwilayah dan antarwaktu. Untuk itu, sarana dan prasarana distribusi pangan, termasuk pemasaran produk perikanan berkualitas dan merata masih harus terus ditingkatkan efektivitas dan efisiensinya. Kelancaran distribusi sangat berpengaruh terhadap kualitas produk perikanan, oleh sebab itu terbatasnya sarana dan prasarana dalam distribusi produk perikanan merupakan masalah yang perlu segera ditangani.

Selanjutnya, dalam periode 2010 – 2014, upaya peningkatan ketahanan pangan juga akan menghadapi permasalahan yang terkait dengan peningkatan pemenuhan kebutuhan konsumsi pangan bagi masyarakat. Masih adanya penduduk dan wilayah rawan pangan akan menjadi prioritas pemerintah dalam memberikan bantuan bahan pangan. Selain itu, peningkatan aksesibilitas masyarakat miskin terhadap bahan pangan juga masih akan menjadi permasalahan ketahanan pangan dalam lima tahun ke depan. Perkembangan diversifikasi konsumsi pangan masih perlu dipercepat dalam lima tahun ke depan. Selama ini, konsumsi energi masyarakat sebagian besar masih berasal dari kelompok padi-padian (sekitar 54 persen), terutama beras. Penganekaragaman konsumsi pangan dan pemenuhan pangan hewani dan ikan bagi masyarakat ini juga



akan menjadi komponen penting dalam perbaikan pola konsumsi pangan masyarakat agar sesuai dengan pola konsumsi pangan yang cukup dan bergizi seimbang. Lebih lanjut, sistem mutu dan penanggulangan masalah keamanan pangan, termasuk penanggulangan penyakit zoonosis dan higienisasi serta penggunaan bahan berbahaya dalam produk perikanan, masih harus ditingkatkan dan menjadi perhatian bersama ke depan.

Terkait penyediaan ikan untuk konsumsi masyarakat, kurang memadainya kondisi prasarana dan sarana pemasaran produk perikanan dalam negeri, rendahnya kesadaran masyarakat terhadap nilai kandungan gizi ikan, adanya pola makan yang berbeda antarwilayah dan rendahnya jaminan keamanan produk perikanan menyebabkan masih rendahnya tingkat konsumsi ikan.

Peningkatan nilai tambah dan daya saing produk pertanian, perikanan, dan kehutanan dalam perdagangan dan pemasaran juga masih akan menjadi tantangan dan permasalahan dalam lima tahun ke depan. Walaupun kemampuan produksi beberapa komoditas pertanian, perikanan, dan kehutanan telah meningkat, namun daya saing produk pertanian Indonesia di pasar ekspor dan pasar domestik secara umum masih perlu ditingkatkan. Dalam upaya ini, kondisi sarana dan prasarana pertanian, perikanan, kehutanan, dan perdesaan perlu terus dikembangkan untuk dapat mendukung kelancaran proses produksi dan pengolahan produk. Peningkatan nilai tambah dan daya saing selama ini juga masih terkendala oleh relatif rendahnya mutu produksi dan produk olahannya. Selain itu, peningkatan nilai tambah harus pula ditopang dengan perbaikan pasca panen dan pengembangan industri pengolahan yang berbasis produk pertanian, perikanan, dan kehutanan, yang selama ini belum berkembang baik. Lebih lanjut, ketersediaan pasokan bahan baku, pemasaran dan sistem distribusi secara umum juga perlu ditingkatkan untuk mendukung upaya peningkatan daya saing pertanian, perikanan, dan kehutanan. Dalam perdagangan internasional, perdagangan dan pemasaran produk masih menghadapi beberapa permasalahan dan hambatan, baik tarif maupun non tarif. Tingkat kemampuan berkompetisi dari industri kayu maupun kayu olahan dibandingkan dengan industri lainnya relatif masih rendah. Ke depan, kebijakan perdagangan internasional harus dikembangkan agar daya saing dan kemampuan ekspor semakin meningkat. Peran ilmu pengetahuan dan teknologi juga penting dalam upaya peningkatan nilai tambah dan daya saing. Efisiensi alat-alat produksi pertanian, perikanan, dan kehutanan, termasuk efisiensi industri pengolahannya dan efisiensi peralatan pengolah masih menjadi tantangan ke depan. Industri dalam negeri juga harus diarahkan agar ketergantungan industri pertanian, perikanan, dan kehutanan dalam negeri terhadap input produksi impor dapat terus dikurangi dari waktu ke waktu.

Peningkatan kapasitas masyarakat pertanian, perikanan, dan kehutanan, serta pengembangan kelembagaan pertanian, perikanan, dan kehutanan juga masih menjadi permasalahan yang harus dihadapi oleh pembangunan pangan dan pertanian dalam lima tahun ke depan. Efisiensi kelembagaan petani/petani hutan/nelayan/pembudidaya

ikan masih perlu terus ditingkatkan. Dengan jumlah petani/petani hutan/nelayan/pembudidaya ikan yang relatif banyak, pengembangan kelembagaan petani/nelayan akan menjadi potensi untuk pembangunan yang sangat besar. Untuk itu, perlu dukungan peningkatan efektivitas sistem kelembagaan penelitian dan inovasi teknologi. Selain itu, kelembagaan penyuluhan yang selama ini belum mampu mendiseminasikan perkembangan dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi kepada masyarakat secara luas. Di samping itu, kelembagaan pendanaan dan pembiayaan (permodalan) usaha pertanian dan perikanan juga masih belum berkembang yang menyebabkan petani/nelayan/pembudidaya ikan menghadapi kendala dalam mengakses modal yang diperlukan. Hal-hal tersebut merupakan sebagian penyebab dari belum efisiennya usaha pertanian/perikanan dan belum terintegrasinya kegiatan agribisnis/agroindustri di perdesaan yang sebagian besar masyarakatnya bertumpu pada sektor pertanian/perikanan/ kehutanan. Kelembagaan pertanian, perikanan, dan kehutanan yang efisien hendaknya mampu membangun keterkaitan dan sinergitas seluruh kegiatan pertanian, perikanan, dan kehutanan dari hulu sampai dengan hilir.

10.2.1.2 Peningkatan Ketahanan dan Kemandirian Energi

Permasalahan **sektor energi** timbul karena adanya laju pertumbuhan peningkatan permintaan energi akibat kegiatan ekonomi dan bertambahnya jumlah penduduk, yang melebihi laju pertumbuhan pasokan energi. Selain itu kondisi geografis negara kepulauan, yang terdiri atas belasan ribu pulau besar dan kecil, serta luasnya wilayah nusantara, mempengaruhi tingkat pelayanan, efisiensi dan keandalan sistem penyediaan dan penyaluran energi di seluruh Indonesia.

Dalam kurun waktu 2004-2008, walaupun pangsa minyak bumi dalam bauran energi nasional telah mengalami penurunan, namun volume pemakaiannya masih bertambah dari tahun ke tahun, dan diperkirakan akan terus tumbuh dalam kurun waktu lima tahun mendatang. Kesenjangan antara konsumsi BBM dengan kemampuan memproduksi minyak mentah dan BBM di dalam negeri telah menyebabkan ketergantungan yang besar terhadap impor, baik impor minyak mentah maupun BBM. Ketergantungan terhadap impor ini menyebabkan ketahanan energi nasional menjadi rentan terhadap fluktuasi harga serta pasokan/permintaan minyak mentah dunia. Kesenjangan antara pasokan dan permintaan BBM dalam negeri juga disebabkan oleh menurunnya produksi minyak mentah dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini terjadi karena sebagian besar (lebih dari 90%) lapangan minyak yang saat ini beroperasi merupakan lapangan minyak tua (*mature*), sedangkan penambahan lapangan minyak baru tidak dapat mengimbangi laju kebutuhan minyak mentah dalam negeri. Salah satu kendala utama pembukaan lapangan minyak baru adalah adanya konflik atau ketidakselarasan fungsi lahan, terutama dengan fungsi kawasan hutan konservasi dan lindung. Selain itu kendala lain adalah keterbatasan permodalan nasional, sehingga ketergantungan terhadap investor asing masih cukup tinggi.



Ketergantungan terhadap impor BBM juga disebabkan oleh karena infrastruktur kilang minyak masih sangat terbatas kapasitasnya. Saat ini, terdapat 10 (sepuluh) kilang minyak yang beroperasi, baik yang dimiliki oleh PT Pertamina (Persero) maupun oleh badan usaha swasta, dengan total kapasitas pengolahan sebesar 1,156 juta barel per hari. Karena konfigurasinya, tidak semua kilang yang ada dapat memproses minyak mentah dari dalam negeri dan hanya dapat memproses minyak mentah impor.

Saat ini sekitar 48,4 persen energi yang dikonsumsi secara nasional berasal dari minyak bumi, sedangkan pemanfaatan sumber energi selain minyak bumi, seperti gas bumi, batubara, dan EBT masih terbentur oleh berbagai hal. Gas bumi belum dapat dimanfaatkan secara optimal. Saat ini pemanfaatan gas untuk dalam negeri masih terkendala oleh kontrak-kontrak jangka panjang dari Perjanjian Jual Beli Gas yang ditandatangani sebelum diterbitkannya UU No. 22/2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, dimana sebagian besar gas ini diekspor. Pemanfaatan gas untuk dalam negeri juga terkendala oleh terbatasnya infrastruktur di dalam negeri, seperti terminal penyimpanan, jaringan transmisi dan distribusi gas, dan sebagainya. Demikian juga halnya pemanfaatan batubara untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri menghadapi kendala keterbatasan infrastruktur, baik berupa pelabuhan maupun jaringan pengangkut batubara.

Energi panas bumi, walaupun merupakan salah satu EBT bersih lingkungan, untuk mengembangkannya dalam skala yang besar membutuhkan investasi yang tinggi, kesiapan institusi, peraturan yang berkaitan dengan harga uap/listrik, dan sumber daya manusia. Pengembangan panas bumi, menurut UU No. 27/2003 tentang Panas Bumi, diserahkan kepada Pemerintah Daerah, dan hal ini menuntut ditingkatkannya kemampuan aparat dan sumber daya manusia di Daerah. Untuk mengembangkan energi nuklir, kendala terbesar yang dihadapi adalah kekhawatiran masyarakat terhadap pengelolaan limbah uranium, di samping dibutuhkan nilai investasi yang tinggi, teknologi tinggi maupun kesiapan budaya dan sumber daya manusia. Demikian pula halnya dengan energi surya yang sampai saat ini belum dapat berkembang menjadi salah satu sumber energi alternatif yang dapat digunakan secara masal. Hal ini disebabkan oleh karena biayanya yang relatif masih tinggi.

Meskipun telah banyak kemajuan dalam upaya meningkatkan efisiensi dalam penyediaan dan pemanfaatan energi namun tingkat inefisiensi masih tinggi jika dibandingkan dengan beberapa negara lain. Angka intensitas energi nasional, dalam periode tahun 2005—2008 adalah sekitar 401 ton oil equivalent (TOE)/juta US\$ PDB (2005 dan 2006), 397 TOE/juta US\$ PDB (2007), dan 382 TOE/juta US\$ PDB (2008) sedangkan angka-angka intensitas energi negara-negara di Asean, pada tahun 2008 Malaysia (335 TOE/juta US\$ PDB), dan rata-rata negara maju yang tergabung dalam OECD adalah 136 TOE/juta US\$ PDB. Inefisiensi terutama terjadi dalam pemakaian BBM di sektor transportasi perkotaan, diantaranya belum melembaganya layanan sistem transportasi umum masal yang memanfaatkan konsumsi energi rendah.

Walaupun dirancang untuk menyediakan energi yang terjangkau oleh masyarakat luas, subsidi harga BBM/LPG dan listrik ikut menyumbang terhadap inefisiensi dan pemborosan penggunaan energi – tidak mendorong prakarsa masyarakat untuk melakukan penghematan energi. Disamping menyumbang terhadap pemborosan, subsidi harga BBM juga melemahkan upaya penggunaan energi alternatif selain BBM. Harga energi non-BBM menjadi tidak lagi kompetitif, jauh di atas harga energi BBM bersubsidi. Hal ini berdampak terhadap tidak berkembangnya perusahaan EBT, seperti tenaga surya, angin, BBN, dan sebagainya.

Konsumsi energi yang inefisien juga berdampak kepada laju peningkatan emisi karbondioksida (CO₂). Saat ini emisi CO₂ dari sektor energi menyumbang sekitar 14% dari total emisi CO₂ secara nasional, kedua sesudah emisi yang bersumber dari sektor kehutanan dan gambut. Saat ini, kepedulian masyarakat dunia terhadap fenomena perubahan iklim global semakin tinggi, sehingga upaya-upaya mitigasi dari fenomena perubahan iklim, yakni penurunan emisi CO₂ di tingkat nasional, melalui pemanfaatan jenis bahan bakar dan teknologi bersih/ramah lingkungan, perlu dalam perkembangan dan dijadikan konsensus yang lebih luas.

Di samping inefisiensi, penyediaan energi final, terutama listrik dan BBM, juga terkendala oleh terbatasnya tingkat pelayanan infrastruktur energi, seperti fasilitas produksi, pengolahan, pengangkutan dan distribusi, terutama di daerah-daerah perdesaan, terpencil, dan perbatasan. Hal ini mengakibatkan ongkos penyediaan energi menjadi tinggi serta harga energi yang harus dibeli masyarakat menjadi mahal, sehingga akses masyarakat terhadap energi di beberapa wilayah menjadi terkendala. Akuntabilitas masyarakat terhadap energi secara nasional ditunjukkan oleh rendahnya konsumsi rata-rata energi per kapita, yang pada tahun 2008 adalah sekitar 0,467 SBM.

10.2.1.3 Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Mineral dan Pertambangan

Permasalahan yang dihadapi sektor pertambangan diantaranya adalah rendahnya minat berinvestasi **untuk perusahaan mineral dan batubara**. Keadaan ini disebabkan masalah kepastian hukum dan belum optimalnya sistem insentif untuk menarik masuknya investor baru dalam usaha pertambangan. Berbagai kegiatan usaha pertambangan mulai dari eksplorasi, eksploitasi, serta pengolahan hasil tambang memerlukan dana yang besar, dan oleh karena itu pembangunan di bidang pertambangan ini masih sangat tergantung kepada investor skala besar, termasuk investor asing. Investasi asing, di samping akan membawa modal, umumnya juga memasukkan kemampuan teknologi, manajemen, dan saluran pemasaran. Namun, persaingan untuk menarik investasi tersebut, baik antarnegara maupun antarsektor ekonomi di dalam negeri, semakin ketat di tahun-tahun mendatang.

Di samping itu, pembangunan di bidang pertambangan dihadapkan pada masih terbatasnya jumlah maupun kualitas sumber daya manusia profesional dalam penguasaan teknologi tenaga-tenaga pertambangan, sehingga belum dapat memenuhi



kebutuhan yang semakin meningkat. Kegiatan eksplorasi dan pengusahaan pertambangan pada masa mendatang cenderung menghadapi tantangan yang mengarah ke daerah yang lebih sulit dan terpencil. Hal ini menuntut upaya penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi pertambangan yang lebih maju.

Sampai saat ini keterkaitan usaha pertambangan dengan industri pengolahan dan sektor-sektor lainnya belum optimal berkembang. Hal ini berakibat hilangnya kesempatan untuk memperoleh nilai tambah yang potensial, serta ketergantungan industri dalam negeri terhadap impor bahan baku hasil tambang. Dalam kaitan itu, peningkatan industri pengolahan hasil tambang, pengembangan serta penerapan standarisasi produk dan jasa pertambangan, merupakan tantangan yang harus mendapatkan perhatian khusus dalam rangka pengembangan keterkaitan usaha pertambangan dengan sektor industri secara efisien.

Permintaan akan komoditi tambang, terutama batubara, dari luar negeri meningkat dari tahun ke tahun, terutama apabila harga minyak mentah dunia meningkat. Peningkatan permintaan ini diikuti dengan peningkatan produksi dan ekspor batubara. Namun di lain pihak, kebutuhan batubara di dalam negeri meningkat dengan tajam, terutama untuk memenuhi kebutuhan bahan bakar pembangkit listrik. Ke depan, *Domestic Market Obligation* (DMO) bagi pengusaha batubara menjadi sesuatu yang sangat penting untuk memenuhi kebutuhan batubara untuk dalam negeri.

Amanat UU No 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara serta UU No. 12 tahun 2008 tentang Otonomi Daerah, memberikan peran lebih besar kepada daerah belum diikuti dengan peningkatan kemampuan teknis/ managerial aparat Pemerintah Daerah. Karakteristik industri pertambangan yang unik dan khusus memerlukan pemahaman yang mendalam, baik dari segi teknis penambangan, pembiayaan, maupun penanganan dampak sosial/lingkungan dari kegiatan penambangan, termasuk reklamasi dan konservasi. Rendahnya kemampuan aparat pemerintah daerah dalam pengelolaan pertambangan serta kurang harmonisnya peraturan perundangan lintas sektor, menyebabkan timbulnya permasalahan dalam perijinan, pengawasan eksploitasi, produksi, serta pengendalian dampak lingkungan dan konflik lahan.

Indonesia selain memiliki cadangan mineral berskala besar juga memiliki cadangan mineral berskala kecil dan tersebar di banyak tempat. Cadangan mineral tersebut sering tidak efisien jika diusahakan secara modern dan menggunakan teknologi canggih, tetapi masih ekonomis jika diusahakan oleh pertambangan rakyat. Pertambangan jenis ini sering diusahakan oleh rakyat setempat tanpa memperhatikan kelestarian lingkungan ataupun peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sementara itu, usaha pertambangan rakyat secara tradisional tidak mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat penambang secara berarti.

Kegiatan usaha pertambangan banyak menimbulkan dampak negatif terhadap kelestarian fungsi lingkungan hidup fisik meliputi air, udara, tanah, dan bentang alam,

ataupun nonfisik seperti sosial ekonomi dan budaya masyarakat. Persyaratan lingkungan yang semakin ketat di tingkat nasional dan internasional memerlukan perhatian yang semakin besar terhadap aspek lingkungan hidup dalam kegiatan pertambangan. Di samping itu, pembangunan pertambangan sebagai upaya pemanfaatan sumber daya alam belum dilaksanakan, ditata, dan dikembangkan secara terpadu dengan pembangunan wilayah dalam suatu kerangka tata ruang yang terintegrasi.

Kegiatan perencanaan dan pengembangan pertambangan, baik oleh swasta maupun Pemerintah, menuntut tersedianya data dan informasi geologi sumber daya mineral secara lengkap dan rinci. Dewasa ini upaya pengumpulan, pengolahan, penyimpanan serta pemanfaatan informasi geologi dan sumber daya mineral belum sepenuhnya mampu memberikan informasi secara cepat, lengkap dan efisien. Sistem informasi geologi dan sumber daya mineral perlu dipadukan dengan memanfaatkan teknologi informasi yang mutakhir.

Belum terpadunya konsep penataan ruang juga menjadi kendala dalam pengembangan usaha pertambangan karena sering mengakibatkan tumpang tindih dalam pemberian hak pemanfaatan lahan dan ruang. Tumpang tindih lahan antara kawasan tambang dan kawasan hutan lindung/konservasi telah menghambat laju pertumbuhan investasi eksplorasi tambang. Sebagian besar kawasan tambang yang sudah dikeluarkan ijin penambangannya berada di kawasan hutan lindung, yang umumnya ditetapkan kemudian. Konflik fungsi peruntukan lahan ini telah mengurangi jaminan hukum dalam pengusahaan pertambangan. Untuk itu perlu ada harmonisasi yang lebih efektif antara pemanfaatan potensi mineral dan batubara dengan pelestarian jasa lingkungan kawasan hutan.

10.2.1.4 Perbaikan Kualitas Lingkungan Hidup.

Berbagai upaya untuk menanggulangi kerusakan lingkungan hidup telah dilakukan namun pencemaran dan penurunan kualitas lingkungan hidup masih terus terjadi. Pencemaran dari aktivitas industri, pembangunan infrastruktur, eksploitasi sumberdaya mineral, limbah domestik serta teknologi yang tidak ramah lingkungan terus berjalan. Di beberapa lokasi, tingkat pencemaran terhadap ekosistem dan keanekaragaman hayatinya sudah melebihi baku mutu lingkungan. Akibatnya daya dukung dan daya tampung lingkungan dalam mendukung program-program pembangunan menjadi menurun. Untuk itu diperlukan pengelolaan lingkungan hidup yang terintegrasi dari hulu ke hilir dan lintas sektoral.

Permasalahan lainnya yang dihadapi dalam penanganan kerusakan lingkungan adalah rendahnya kapasitas sumber daya manusia dan institusi pengelola. Selain itu, ketersediaan sistem data dan informasi juga masih perlu diperbaiki. Hal ini mempengaruhi ketepatan perencanaan, monitoring dan evaluasi penanganannya. Untuk itu diperlukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan institusi serta



sistem informasi lingkungan hidup yang terintegrasi.

Keberhasilan pembangunan, selain meningkatkan kesejahteraan juga menimbulkan kerusakan baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap keanekaragaman hayati dan ekosistemnya. Dalam Pembangunan Jangka Menengah 2004-2009, telah dilakukan upaya untuk melestarikan keanekaragaman hayati dan ekosistemnya tersebut. Namun demikian, karena masih rendahnya kesadaran masyarakat, pendekatan pelaksanaan pembangunan yang kurang berwawasan lingkungan serta kebijakan pengelolaan keanekaragaman hayati yang belum terpadu, maka masih diperlukan upaya-upaya pelestarian keanekaragaman hayati yang berkelanjutan dan didukung oleh semua pemangku kepentingan. Berkaitan dengan permasalahan ini, Bappenas, pada tahun 2003, telah menerbitkan dokumen *Indonesia Biodiversity Strategy and Action Plan (IBSAP) 2003-2020*. Dokumen ini disusun dan disepakati oleh para pihak baik di tingkat nasional maupun regional. Sekretariat *United Nation Convention on Bio-Diversity (UNCBD)* juga telah merujuk dokumen ini sebagai dokumen nasional Indonesia.

Selain berdampak pada penurunan kualitas lingkungan, pemanfaatan dan pengelolaan SDA sebagai sumber daya ekonomi juga berpotensi menimbulkan konflik antar daerah. Penanganan konflik ini sudah diagendakan dalam RPJMN 2004-2009. Namun demikian belum diterjemahkan dalam bentuk program dan kegiatan yang nyata. Hal ini mempengaruhi ketidakjelasan hak dan kewenangan untuk mencapai pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berkelanjutan dan lestari. Untuk itu diperlukan upaya untuk mengatasi konflik dengan merumuskan kembali peraturan-peraturan mengenai perlindungan lingkungan dan penegakan hukumnya secara konsisten, penataan ruang bersama yang memperhatikan kelestarian dan keseimbangan pemanfaatan SDA dan LH oleh semua pihak, membangun mekanisme penyelesaian konflik di tingkat pusat, regional dan lokal untuk mencegah kemungkinan timbulnya konflik antarsektor pembangunan serta antara wilayah ekologis dengan administratif dalam hal pemanfaatan SDA.

10.2.1.5 Peningkatan Konservasi dan Rehabilitasi Sumber Daya Hutan

Secara umum dalam lima tahun terakhir ini berbagai permasalahan, hambatan, dan tantangan dalam pembangunan kehutanan adalah belum optimalnya pengelolaan kawasan hutan dalam rangka pelestarian, pengawetan, dan pemanfaatan sumber daya hutan, serta masih tingginya laju deforestasi dan degradasi hutan.

Salah satu penyebab belum optimalnya pengelolaan kawasan hutan karena belum terselesaikannya tata batas kawasan hutan. Ketidakjelasan tata batas kawasan ini memberikan ancaman pada pengelolaan kawasan hutan terutama di kawasan konservasi. Ketidakjelasan kawasan hutan juga memicu terjadinya tumpang tindih kawasan hutan dengan kegiatan sektor lain serta alih fungsi kawasan hutan untuk penggunaan lain di luar kehutanan yang tidak terkendali. Selain itu, ketiadaan Kesatuan

Pengelolaan Hutan (KPH) sebagai unit pengelola hutan menunjukkan bahwa kawasan hutan masih berstatus '*open access*'. Masih tingginya kawasan hutan berstatus '*open access*' juga merupakan ancaman terhadap pengelolaan hutan.

Belum jelasnya tata batas kawasan hutan tersebut juga telah menyebabkan terjadinya deforestasi dan degradasi hutan. Dalam lima tahun terakhir ini, laju deforestasi telah mencapai sekitar 1 juta ha per tahun. Sedangkan hutan yang sudah mengalami degradasi adalah kawasan hutan yang mengalami penurunan kualitas ekosistem hutan, dari hutan primer ke hutan sekunder, dari hutan sekunder menjadi semak belukar dan alang-alang yang mencapai lebih dari 50 juta hektar. Laju deforestasi yang cukup tinggi dan degradasi hutan yang terus meluas tersebut merupakan penyebab meningkatnya luas lahan kritis. Luas lahan kritis dan sangat kritis di Indonesia mencapai 30,19 juta ha yang tersebar di 472 Daerah Aliran Sungai (DAS). Dari target rehabilitasi hutan dan lahan kritis sampai dengan tahun 2009 yaitu seluas 5 juta ha, baru tercapai 2,029 juta hektar.

Permasalahan lain yang menyebabkan kerusakan kawasan hutan adalah kejadian kebakaran hutan dan tekanan demografi. Masih banyaknya *hot spot* merupakan permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan kehutanan. Sementara itu, kawasan konservasi seluas 27,3 juta ha dan hutan lindung seluas 31,60 juta ha saat ini juga mengalami tekanan oleh masyarakat sehingga dikhawatirkan mengganggu fungsi dan perannya sebagai penyangga kehidupan. Tekanan demografi kepada kawasan konservasi menyebabkan terjadinya fragmentasi habitat satwa yang berdampak pada menurunnya atau terancam punahnya populasi tanaman dan satwa. Luas kawasan konservasi yang ditambah saat ini mencapai 460.407,89 ha, beberapa habitat *endangered spesies* mengalami ancaman kepunahan. Di samping itu, masih terjadinya perdagangan tanaman dan satwa liar yang terancam punah akibat kemampuan aparat yang masih rendah serta belum terpenuhinya sarana dan prasarana pendukung.

Peran hutan sebagai penyangga kehidupan dan habitat alami saat ini belum dinilai sebagai jasa lingkungan yang diperhitungkan. Selain hasil hutan non-kayu, jasa lingkungan dari ekosistem hutan belum tercermin pada penilaian total *forest value* sebagai regulator air, sumber keanekaragaman hayati, udara bersih, keseimbangan iklim, keindahan alam, dan kapasitas asimilasi lingkungan yang memiliki manfaat besar sebagai penyangga kehidupan dan potensi ekonomi.

10.2.1.6 Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan

Sektor kelautan masih banyak menghadapi kendala dalam upaya untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya kelautan bagi sumber pendapatan negara serta mengoptimalkan fungsi laut sebagai sistem penyangga kehidupan dan kekayaan plasma nutfah yang potensinya terbesar di dunia.

Masih merebaknya praktek *IUU* dan *destructive fishing* merupakan salah satu kendala utama yang dihadapi. Pencurian ikan (*illegal fishing*), baik oleh kapal-kapal



domestik dengan atau tanpa ijin maupun kapal-kapal asing di perairan teritorial maupun di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI), menyebabkan hilangnya sumber daya ikan sekitar 1-1,5 juta ton per tahun atau senilai sekitar US\$ 2 milyar. Upaya pengendalian dan pengawasan *illegal fishing* masih belum optimal, akibat kurangnya sarana dan alat di laut. Sementara itu, penangkapan ikan yang merusak lingkungan seperti penggunaan bahan peledak dan racun (*potasium*) masih banyak terjadi, yang juga dipicu oleh meningkatnya permintaan ikan karang dari luar negeri dengan harga yang cukup tinggi. Kegiatan ini menyebabkan rusaknya ekosistem terumbu karang yang merupakan habitat ikan yang sangat penting. Dari berbagai kasus *illegal fishing* selama ini, modus operandi pelanggaran yang dilakukan oleh kapal asing maupun eks asing antara lain pelanggaran tanpa dokumen izin, menyalahi daerah tangkapan (*fishing ground*), menyalahi ketentuan alat tangkap, pemindahan hasil tangkapan (*transshipment*) di laut, pemalsuan dokumen dan manipulasi informasi hasil tangkapan atau ikan yang diangkut.

Selain itu, habitat ekosistem pesisir dan laut semakin rusak sehingga menyebabkan menurunnya ketersediaan sumber daya plasma nutfah dan meluasnya abrasi pantai. Kerusakan habitat ekosistem di wilayah pesisir dan laut semakin meningkat, khususnya di wilayah padat kegiatan seperti pantai utara Pulau Jawa dan pantai timur Pulau Sumatera. Rusaknya habitat ekosistem pesisir seperti deforestasi hutan mangrove serta terjadinya degradasi sebagian besar terumbu karang dan padang lamun telah mengakibatkan erosi pantai dan berkurangnya keanekaragaman hayati (*biodiversity*). Erosi ini juga diperburuk oleh perencanaan tata ruang dan pengembangan wilayah yang kurang tepat. Beberapa kegiatan yang diduga sebagai penyebab terjadinya erosi pantai, antara lain pengambilan pasir laut untuk reklamasi pantai, pembangunan hotel, perumahan, serta industri dan kegiatan-kegiatan lain yang bertujuan untuk memanfaatkan pantai dan perairannya. Perubahan lingkungan dan abrasi pantai mengancam keberadaan lahan produktif dan wilayah pariwisata.

Di samping itu, tingkat pencemaran di beberapa kawasan pesisir dan laut juga berada pada kondisi yang sangat memprihatinkan. Sumber utama pencemaran pesisir dan laut terutama berasal dari darat, yaitu kegiatan industri, rumah tangga, dan pertanian. Sumber pencemaran juga berasal dari berbagai kegiatan di laut, terutama dari kegiatan perhubungan laut dan kapal pengangkut minyak serta kegiatan pertambangan. Kondisi diperparah dengan adanya dampak perubahan iklim terhadap wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil. Selama kurun waktu 2006 – 2008, jumlah pulau yang tenggelam diperkirakan mencapai sekitar 20 pulau lebih. Selain itu, ekosistem pesisir khususnya terumbu karang dan padang lamun akan terganggu yang pada akhirnya akan mengancam ketersediaan ikan sebagai sumber pangan bagi masyarakat.

Permasalahan lainnya adalah **belum optimalnya pengelolaan pulau-pulau kecil**. Indonesia memiliki banyak sekali pulau-pulau kecil, tetapi lebih dari tiga dasawarsa terakhir pulau-pulau kecil tersebut kurang atau tidak memperoleh perhatian

dan atau tersentuh kegiatan pembangunan. Pulau kecil sangat rentan terhadap perubahan alam karena daya dukung lingkungannya sangat terbatas dan cenderung mempunyai spesies endemik yang tinggi. Wilayah perbatasan dan terpencil kondisinya masih terbelakang, terutama di pulau kecil perbatasan, wilayah perbatasan, termasuk pulau-pulau kecil terluar memiliki potensi sumber daya alam yang cukup besar, serta merupakan wilayah yang sangat strategis bagi pertahanan dan keamanan negara. Permasalahan utama dari ketertinggalan pembangunan di wilayah perbatasan adalah arah kebijakan pembangunan kewilayahan yang selama ini cenderung berorientasi *'inward looking'* sehingga seolah-olah kawasan perbatasan seperti pulau-pulau terdepan hanya menjadi halaman belakang dari pembangunan negara.

Hal lainnya yang menjadi permasalahan dalam pengelolaan sumber daya kelautan adalah **masih rendahnya pemanfaatan Rencana Tata Ruang** sebagai acuan dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan. Pembangunan kelautan yang dilakukan di suatu wilayah saat ini masih sering dilakukan tanpa mempertimbangkan keberlanjutannya. Keinginan untuk memperoleh keuntungan ekonomi jangka pendek seringkali menimbulkan keinginan untuk mengeksploitasi sumber daya kelautan secara berlebihan sehingga menurunkan kualitas (*degradasi*) dan kuantitas (*depleksi*) sumber daya kelautan dan lingkungan hidup. Selain itu, seringkali pula terjadi konflik pemanfaatan ruang antarsektor akibat kurangnya pengendalian dalam pemanfaatan ruang pesisir.

Minimnya riset teknologi kelautan dan penerapannya untuk mendukung **pembangunan kelautan nasional**, termasuk riset sumber daya kelautan di laut dalam. Lemahnya sinergi kebijakan Iptek nasional, termasuk kelautan, menyebabkan kegiatan Iptek belum sanggup memberikan hasil yang signifikan. Kebijakan bidang pendidikan, industri, dan Iptek belum terintegrasi sehingga mengakibatkan kapasitas yang tidak termanfaatkan pada sisi penyedia, tidak berjalannya sistem transaksi, dan belum tumbuhnya permintaan dari sisi pengguna yaitu industri kelautan dan perikanan. Di samping itu, kebijakan fiskal juga dirasakan belum kondusif bagi pengembangan kemampuan Iptek kelautan dan perikanan.

10.2.1.7 Peningkatan Kualitas Informasi Iklim dan Bencana Alam serta Kapasitas Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim

Penanganan isu perubahan iklim (*climate change*) baik berupa kegiatan adaptasi maupun mitigasi belum dilaksanakan secara optimal di Indonesia. Padahal Indonesia sebagai negara kepulauan yang melimpah sumberdaya alam dan memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi di daerah tropis, mempunyai posisi yang rentan dan strategis untuk berperan dalam menangani isu ini. Program adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim mutlak dilakukan, yang selain untuk menghindari dampak perubahan iklim juga untuk mengurangi degradasi kualitas lingkungan hidup.

Dalam hal penanganan perubahan iklim dan bencana alam, walaupun sudah

dilakukan upaya penyediaan sistem informasi yang cepat namun masih diperlukan peningkatan baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Hal ini dapat mempengaruhi pada akurasi informasi yang tersedia. Untuk itu diperlukan ketersediaan sumber daya untuk perawatan dan penambahan sebaran peralatan observasi dan kalibrasi; peraturan perundangan yang mengatur tentang penyelenggaraan dan integrasi informasi dari aspek Meteorologi, Klimatologi, Kualitas Udara dan Geofisika (MKKuG); serta metoda diseminasi informasi potensi tsunami, dan produk informasi MKKuG lainnya kepada masyarakat yang lebih luas.

Permasalahan lainnya yang dihadapi dalam penanganan kerusakan lingkungan dan perubahan iklim ialah rendahnya kapasitas sumber daya manusia dan institusi pengelola. Selain itu, ketersediaan sistem data dan informasi juga masih perlu diperbaiki. Hal ini mempengaruhi ketepatan perencanaan, monitoring dan evaluasi penanganannya. Untuk itu diperlukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan institusi serta sistem informasi lingkungan hidup yang terintegrasi.

10.2.2 Sasaran

Sasaran pokok yang ingin dicapai dalam pembangunan SDA dan LH pada RPJMN 2010-2014 secara umum adalah meningkatnya kontribusi pembangunan SDA dan LH terhadap pertumbuhan ekonomi nasional dan kontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja PPK di perdesaan, serta meningkatkan sumbangan ekspor dari sektor PPK. Selain itu, sasaran pembangunan SDA dan LH lainnya adalah menjaga kondisi SDA dan LH seperti saat ini atau meningkat kualitasnya.

10.2.2.1 *Peningkatan Ketahanan Pangan dan Revitalisasi Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan*

Sasaran utama prioritas Peningkatan Ketahanan Pangan dan Revitalisasi Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan adalah: (1) Terpeliharanya ketersediaan beras dan meningkatnya tingkat ketersediaan pangan pokok lainnya dari produksi dalam negeri; (2) Tercapainya tingkat pertumbuhan PDB sektor pertanian, perikanan, dan kehutanan rata-rata 3,7 - 3,9 persen per tahun; (3) Meningkatnya aksesibilitas rumah tangga miskin dan rumah tangga rawan pangan terhadap pangan; (4) Terjaganya stabilitas harga komoditas pangan, termasuk ikan pada tingkat yang terjangkau oleh kelompok masyarakat berpendapatan menengah ke bawah (5) Meningkatnya ketersediaan dan konsumsi ikan sebagai sumber pangan protein hewani; (6) Meningkatnya nilai tambah dan daya saing produk pertanian, perikanan, dan kehutanan di kawasan Asia dan global; (7) Membaiknya tingkat kesejahteraan petani, yang diindikasikan oleh peningkatan indeks Nilai Tukar Petani (NTP) menjadi 115-120 dan Nilai Tukar Nelayan (NTN) menjadi 115-120.

Peningkatan produksi dan produktivitas pangan, pertanian, perikanan, dan kehutanan terutama diarahkan untuk meningkatkan ketersediaan pangan dan bahan

baku industri dalam negeri. Untuk itu, sasaran ini akan diwujudkan melalui pencapaian: (i) terpeliharanya swasembada beras dan meningkatnya swasembada bahan pangan lain (jagung, kedele, gula, daging sapi, dan susu) dari produksi dalam negeri, dengan sistem produksi yang semakin efisien; (ii) terjaminnya ketersediaan input produksi pangan, pertanian, perikanan, dan kehutanan, baik benih/bibit, pupuk, obat-obatan, alat maupun mesin; (iii) meningkatnya produksi perikanan menjadi 22,39 juta ton pada tahun 2014; (iv) terpeliharanya dan/atau meningkatnya kuantitas dan kualitas sumber daya lahan dan air untuk kegiatan pertanian, perikanan, dan kehutanan; (v) terbangunnya dukungan sarana dan prasarana pembangunan pertanian, perikanan, kehutanan, dan perdesaan yang memadai terutama di sentra-sentra produksi; (vi) berkembangnya ilmu pengetahuan, dan teknologi yang mendukung pembangunan pertanian, perikanan, dan kehutanan; (vii) terkendalinya organisme pengganggu komoditas pertanian, perikanan, dan kehutanan; (viii) berkembangnya usaha hutan rakyat untuk bahan baku industri pertukangan 250 ribu, hutan desa 500.000 ha, dan hutan kemasyarakatan 2 juta ha; (ix) penambahan tanaman HTI dan HTR seluas 3 juta ha; (x) peningkatan produksi hasil hutan kayu, hasil hutan bukan kayu (HHBK), dan jasa lingkungan sebesar 5%; (xi) pengelolaan *logged over area* (LOA) oleh pemegang ijin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu restorasi seluas 2,5 juta ha.

Efisiensi sistem distribusi dan stabilisasi harga pangan domestik akan dicapai melalui: (i) meningkatnya dan terjaminnya jumlah cadangan pangan pemerintah dan pemerintah daerah untuk stabilisasi harga pangan; (ii) terbangunnya kebijakan perdagangan dan ekspor-impor pangan yang mendukung kepentingan ketahanan pangan nasional; (iii) terbangunnya sarana dan prasarana distribusi, pemasaran, dan logistik bahan pangan dalam negeri; serta (iv) terkendalinya gejolak harga pangan antarwilayah dan antarwaktu.

Sedangkan sasaran pemenuhan kebutuhan konsumsi pangan masyarakat akan diwujudkan melalui: (i) meningkatnya kualitas dan keragaman konsumsi pangan masyarakat dengan pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH) mendekati nilai 95; (ii) meningkatnya ketersediaan ikan untuk dikonsumsi menjadi 38,67 kg per kapita per tahun; (iii) berkembangnya agroindustri pengolahan yang berbasis bahan pangan lokal; (iv) menurunnya jumlah dan persentase penduduk dan wilayah yang mengalami kerawanan pangan; (v) terjaminnya cadangan pangan pemerintah dan pemerintah daerah untuk keperluan bantuan pangan; (vi) terbangunnya sistem dan pengawasan mutu, keamanan, dan kehalalan pangan; (vii) meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap pemenuhan pangan yang bergizi dan seimbang serta pola hidup sehat; serta (viii) terbangunnya kelembagaan dan jaringan pangan dan gizi yang terkoordinasi dan terpadu.

Sasaran dalam peningkatan nilai tambah, daya saing, dan pemasaran produk pertanian, perikanan, dan kehutanan, meliputi: (i) meningkatnya volume dan/atau nilai ekspor produk pertanian, perikanan, dan kehutanan strategis; (ii) menurunnya jumlah kasus penolakan ekspor produk pertanian, perikanan dan kehutanan di pasar

internasional; (iii) meningkatnya dukungan sarana dan prasarana pemasaran produk pertanian, perikanan, dan kehutanan dalam negeri; (iv) meningkatnya fungsi sistem perkarantina pertanian, perikanan, dan kehutanan; (v) meningkatnya kuantitas dan kualitas produk olahan dari hasil pertanian, perikanan, dan kehutanan olahan; (vi) memperluas akses pasar domestik dan internasional bagi produk perikanan; (vii) meningkatnya Industri Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IPHHK) berbahan baku kayu berdiameter kecil, dari hutan tanaman, serta limbah menjadi 75 % dari total industri yang ada; (viii) sertifikat Pengelolaan Hutan Lestari kepada 50 unit manajemen hutan tanaman dan 50% unit Izin Usaha Pengelolaan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) bersertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL); (ix) sebesar 50% produksi tebang bersertifikat Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK); (x) efisiensi penggunaan bahan baku industri rata-rata 10%.

Sasaran dalam peningkatan kapasitas petani, nelayan, dan pembudidaya ikan meliputi: (i) meningkatnya kuantitas, kualitas, dan cakupan penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan; (ii) terwujudnya harmonisasi peraturan pertanian, perikanan, dan kehutanan dari pusat sampai daerah; (iii) meningkatnya pengetahuan dan keterampilan masyarakat pertanian, perikanan, dan kehutanan, termasuk dalam hal pengolahan hasil; serta (iv) meningkatnya dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi serta penelitian yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat pertanian, perikanan, dan kehutanan.

10.2.2.2 Peningkatan Ketahanan dan Kemandirian Energi

Pembangunan ketahanan dan kemandirian energi dilakukan untuk mencapai beberapa hal, yakni: (a) diversifikasi atau bauran energi yang dapat menjamin kelangsungan dan jumlah pasokan energi di seluruh wilayah Indonesia dan untuk seluruh penduduk Indonesia dengan tingkat pendapatan yang berbeda-beda; (b) meningkatnya penggunaan EBT dan berpartisipasi aktif dan memanfaatkan berkembangnya perdagangan carbon secara global; (c) meningkatnya efisiensi konsumsi dan penghematan energi baik di lingkungan rumah tangga maupun industri dan sektor transportasi; dan (d) meningkatnya produksi dan pemanfaatan energi yang bersih dan ekonomis.

Sasaran yang akan dicapai dalam pembangunan ketahanan dan kemandirian energi pada tahun 2014 adalah sebagai berikut: (i) tercapainya peranan gas bumi sebesar 20% dan batubara sebesar 30% dalam bauran energi primer, serta EBT sebesar 16%; (ii) tercapainya produksi minyak bumi 1,01 juta barel per hari, produksi gas bumi 1.633 ribu SBM per hari atau 9.000 MMSCF per hari serta gas metana batubara 113 ribu SBM per hari; (iii) meningkatnya produksi BBM 45,9 juta KL, LPG 2 juta ton, LNG 23,15 juta ton; (iv) meningkatnya cadangan minyak bumi menjadi 8.651,8 milyar barel, gas bumi 172 TSCF, gas metana batubara 24 TSCF; (v) tercapainya produksi BBN, yakni bio-diesel 2.737 ribu KL dan bio-ethanol 1.334 ribu KL, dan penggunaan BBN dalam pemakaian bahan bakar total, yakni bio-diesel 8% dan bio-ethanol 5%; (vi) tercapainya

pengalihan pemakaian minyak tanah ke LPG sebesar 77,7 persen; (vii) tercapainya penggunaan panas bumi PLTP 5,807 MW, mikrohidro PLTMH 1.897 MW, tenaga surya PLTS 6.120 MWp, tenaga angin PLT Angin 0,6 MW; (viii) tercapainya efisiensi pemanfaatan energi dengan elastisitas energi sebesar 1,48 dan intensitas energi sebesar 370 TOE/US\$ juta PDB; dan (ix) meningkatnya tingkat penghematan energi sebesar 13-15% dari perkiraan penggunaan energi *business as usual*.

10.2.2.3 Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Mineral dan Pertambangan

Pembangunan **peningkatan pengelolaan sumber daya mineral dan pertambangan** dilakukan untuk mencapai beberapa hal, yakni: (i) meningkatnya produksi dan jenis produk tambang untuk digunakan dalam memenuhi kebutuhan bahan bakar dan bahan baku di dalam negeri; (ii) terwujudnya penambangan yang efisien dan produktif didukung oleh kemampuan penguasaan teknologi, kualitas sumber daya manusia dan manajemen usaha pertambangan; (iv) meningkatnya peran serta masyarakat, terutama melalui wadah koperasi, dalam perusahaan pertambangan, terutama pertambangan rakyat; (v) meluasnya kegiatan perusahaan pertambangan yang mendukung pengembangan wilayah, terutama kawasan timur Indonesia; (vi) tersedianya pelayanan informasi geologi/sumber daya mineral, baik untuk keperluan eksplorasi, penataan ruang, reklamasi kawasan bekas tambang, maupun mitigasi bencana alam.

Sasaran produksi pertambangan mineral dan batubara yang akan dicapai pada tahun 2014 adalah: (i) tercapainya produksi batubara 309 juta ton, dengan *Domestic Market Obligation* sebanyak 110 juta ton; (ii) tercapainya produksi timah sebesar 110,25 ribu ton; (iii) tercapainya produksi bijih nikel sebesar 12,32 juta ton, feronikel sebesar 20,36 ribu ton, dan nikel matte sebesar 91,82 ribu ton; (iv) tercapainya produksi bauksit sebesar 11,46 juta ton; (v) tercapainya produksi konsentrat tembaga sebesar 944,92 ribu ton; (vi) tercapainya produksi emas sebesar 117,75 ton dan perak sebesar 274,41 ton; dan (vii) tercapainya produksi bijih besi sebesar 4,59 juta ton. Sedangkan sasaran dalam penyediaan informasi dasar geologi dan reklamasi kawasan tambang yang akan dicapai adalah sebagai berikut: (i) selesainya rekomendasi usulan rata-rata per tahun sebanyak 40 wilayah kerja pertambangan (WKP) dan wilayah pertambangan (WP); (ii) selesainya pemetaan/peta geologi daerah bahaya seluruh gunung api; (iii) selesainya pemetaan geofisika udara di Pulau Kalimantan dan Sulawesi; (iv) selesainya peta dasar geologi bagi daerah-daerah pusat pertumbuhan ekonomi di Pulau Jawa; (v) selesainya pemetaan geologi teknik tata ruang kawasan di beberapa daerah; (vi) selesainya reklamasi kawasan pertambangan seluas rata-rata 6.200 ha per tahun; dan (vii) pengurangan volume gas flare (100 persen), limbah (75 persen), dan peningkatan penggunaan bahan-bahan kimia dan lumpur pemboran ramah lingkungan (100 persen).

10.2.2.4 Perbaikan Kualitas Lingkungan Hidup.

Dari sektor lingkungan hidup, secara umum, sasaran pembangunan yang ingin dicapai adalah mengelola daya dukung dan memulihkan kualitas daya tampung lingkungan hidup. Sasaran khusus yang hendak dicapai antara lain adalah: (i) terkendalinya pencemaran dan perusakan lingkungan hidup; (ii) terjaganya kelestarian SDA dan LH dan kemampuan SDA dalam mendukung pembangunan berkelanjutan; (iii) meningkatnya kapasitas sumber daya manusia pengelola lingkungan, menguatnya kelembagaan pengelola lingkungan hidup, harmonisnya kerangka regulasi dan terlaksananya kepastian hukum dan penyelesaian konflik pemanfaatan lingkungan hidup, serta tersedianya data dan informasi kualitas SDA dan LH sebagai dasar perencanaan pembangunan.

10.2.2.5 Peningkatan Konservasi dan Rehabilitasi Sumber Daya Hutan

Sasaran yang akan dicapai dalam konservasi dan rehabilitasi sumber daya **hutan** adalah: (i) Penyelesaian tata batas kawasan hutan sepanjang 25.000 km, batas luar, dan batas fungsi kawasan hutan; (ii) Keputusan penunjukan kawasan hutan provinsi selesai 100 persen; (iii) Meningkatnya pengelolaan konservasi dan pendayagunaan taman nasional dan kawasan konservasi lainnya; (iv) Penanganan kasus baru tindak pidana kehutanan (*illegal logging*, perambahan, perdagangan tumbuhan dan satwa liar secara ilegal, penambangan ilegal) terselesaikan 75 persen; (v) Menekan praktek pencurian dan perdagangan kayu dan produk hutan lainnya secara ilegal hingga 75 persen dari tahun 2009; (vi) Penyelesaian kasus perambahan di kawasan konservasi dengan target 20 persen dari total areal perambahan; (vii) penurunan jumlah hot spot sebesar 20 persen dari rata-rata tahun 2004-2009 di Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi; (viii) Populasi spesies kunci yang terancam punah minimal stabil atau bertambah 3 persen dari tahun 2008 sesuai kemampuan biologis dan habitat yang tersedia; (ix) Rencana Pengelolaan DAS terpadu pada 108 unit DAS prioritas; (x) Penanaman areal rehabilitasi hutan dan lahan serta fasilitasi penanaman lahan kritis dengan areal tanaman seluas 2,5 juta ha; (xi); Tersedianya areal pengelolaan hutan kemasyarakatan seluas 2 juta ha; dan (xii) Pembangunan penyedia bibit di tiap regional.

10.2.2.6 Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan

Sasaran yang akan dicapai dalam pembangunan bidang **kelautan** dalam RPJMN 2010-2014 adalah: (i) terwujudnya sistem pengendalian dan pengawasan sumber daya kelautan secara terpadu dan meningkatnya tingkat ketaatan dalam pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan; (ii) terwujudnya kebijakan nasional pembangunan negara kepulauan Indonesia yang terpadu; (iii) terwujudnya pengelolaan pulau-pulau kecil dan pulau-pulau terdepan yang menjadi batas wilayah NKRI sehingga menjadi pulau-pulau bernilai ekonomi tinggi; (iv) terwujudnya upaya rehabilitasi, konservasi dan preservasi ekosistem pesisir dan laut; (v) terwujudnya kerja sama

internasional, regional, dan antardaerah dalam bidang konservasi, seperti *Coral Triangle Initiative (CTI)*, *Sulu-Sulawesi Marine Ecoregion (SSME)*, *Bismarck South Solomon Ecoregion (BSSE)*, *Arafura Timor Sea Ecosystem Action (ATSEA)*, Teluk Tomini, Teluk Bone, Selat Karimata, dan lain-lain; (vi) terjadinya peningkatan riset pengembangan teknologi kelautan dan penerapannya untuk mendukung pembangunan kelautan nasional.

10.2.2.7 Peningkatan Kualitas Informasi Iklim dan Bencana Alam serta Kapasitas Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim

Sasaran prioritas untuk meningkatkan kualitas informasi iklim dan bencana alam ini adalah meningkatnya kapasitas pemahaman institusi dalam melakukan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Secara khusus, sasaran prioritas peningkatan Kapasitas Adaptasi dan Mitigasi Dampak Perubahan Iklim adalah: (i) meningkatnya kesiapan sektor pembangunan dalam menghadapi dampak perubahan iklim baik dalam perencanaan maupun penganggaran; (ii) menurunnya emisi karbon; (iii) menguatnya kapasitas sumber daya manusia, kapasitas kelembagaan dan meningkatnya pendanaan alternatif untuk pelaksanaan kegiatan dalam rangka pengendalian terhadap perubahan iklim, serta tersedianya data dan informasi yang cukup sebagai dasar pelaksanaan kegiatan tersebut.

10.3 Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan

Dalam kerangka Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, pembangunan sumber daya alam dan lingkungan hidup terutama mendukung Misi 2 Mewujudkan bangsa yang berdaya saing, Misi 5 Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan, Misi 6 Mewujudkan Indonesia asri dan Lestari, dan Misi 7 Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional.

Dalam mendukung Misi 2 mewujudkan bangsa yang berdaya saing, pembangunan bidang SDA dan LH akan menekankan peranan pertanian, perikanan, kehutanan, dan pertambangan sebagai basis pengembangan aktivitas ekonomi, dan mendukung sektor industri, serta memanfaatkan kondisi global saat ini sebagai peluang dalam meningkatkan daya saing.

Untuk mendukung Misi 5 mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan, Pembangunan bidang SDA dan LH terutama difokuskan pada menjaga ketahanan pangan dengan meningkatkan kemampuan produksi dalam negeri, dengan harga yang terjangkau dan sesuai dengan keanekaragaman sumber daya pangan lokal, serta mengantisipasi dinamika harga pangan di pasar global yang dikhawatirkan akan mengakibatkan krisis pangan, disamping dampak perubahan iklim yang berpotensi menurunkan kemampuan produksi pangan seperti perubahan pola tanam serta banjir dan kekeringan.



Berkaitan dengan dukungan terhadap Misi 6 mewujudkan Indonesia asri dan lestari, pembangunan SDA dan LH akan mengutamakan pada memulihkan daya dukung SDA dan LH untuk meningkatkan produksi dalam negeri dan meningkatkan nilai tambah, mengamankan ketersediaan energi yang terukur sesuai dengan sumber daya dan kebutuhan dan meningkatkan pengembangan energi alternatif, serta memanfaatkan jasa lingkungan dalam mencegah degradasi lingkungan dan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mencintai lingkungan.

Dukungan pembangunan sumber daya alam dan lingkungan hidup terhadap Misi 7 mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional, dilakukan dengan membangkitkan wawasan dan budaya bahari dan mengamankan wilayah kedaulatan yuridiksi dan aset NKRI, menguatkan peranan SDA bidang kelautan dan mengembangkan industri kelautan secara sinergi dan berkelanjutan, serta melakukan mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim di wilayah pesisir dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah pesisir.

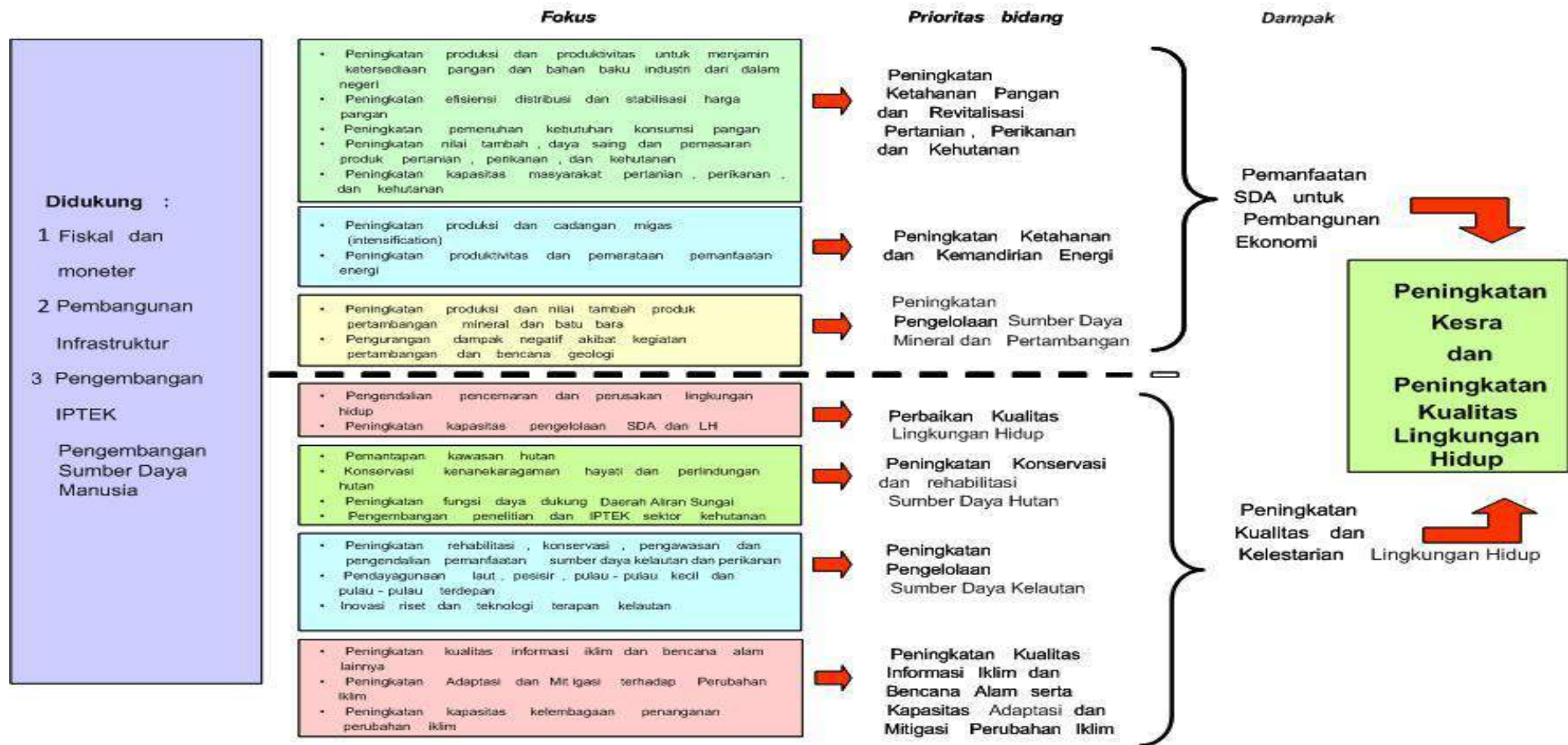
Kebijakan pembangunan SDA dan LH dalam RPJM 2010-2014 diarahkan untuk: (1) mendukung pembangunan perekonomian nasional terutama dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mewujudkan daya saing ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat; serta (2) meningkatkan pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan.

Dalam rangka mendukung pembangunan perekonomian nasional untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, peningkatan daya saing ekonomi, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat, pembangunan SDA dan LH terutama akan dilakukan melalui strategi: (1) penguatan pembangunan pertanian dan peningkatan pembangunan kelautan serta sumber daya kehutanan sesuai potensi daerah secara terpadu yang didukung dengan pengembangan Iptek; (2) peningkatan pemanfaatan energi terbarukan, khususnya bioenergi, panas bumi, tenaga air, tenaga angin, dan tenaga surya untuk kelistrikan; (3) pengembangan sumber daya air; (4) pengembangan industri kelautan dan perikanan; serta (5) pengembangan sumber daya mineral.

Selanjutnya pembangunan SDA dan LH dalam rangka meningkatkan pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan, akan dilakukan melalui strategi: (1) penguatan kelembagaan dan peningkatan kesadaran serta partisipasi aktif masyarakat dalam rehabilitasi dan konservasi sumber daya alam dan lingkungan hidup; (2) pelestarian dan konservasi keanekaragaman hayati dan ekosistemnya; (3) pemantapan kelembagaan dan kapasitas antisipatif dalam penanggulangan bencana di setiap tingkatan pemerintahan; serta (4) pengelolaan lingkungan yang didukung oleh semua sektor terkait. Upaya-upaya pembangunan SDA dan LH tersebut didukung dengan kualitas perencanaan tata ruang yang terintegrasi dan disepakati para pihak, sehingga dapat menjadi instrumen dalam penyelesaian konflik dan pengelolaan SDA dan LH.

GAMBAR 10.6

ALUR PEMBANGUNAN BIDANG SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP



10.3.1 Peningkatan Ketahanan Pangan dan Revitalisasi Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan

Untuk mencapai sasaran yang sudah ditetapkan, maka kebijakan umum dalam peningkatan ketahanan pangan adalah meningkatkan ketahanan dan kemandirian pangan serta kecukupan gizi masyarakat secara luas. Selain itu, diarahkan pula untuk melanjutkan dan meningkatkan revitalisasi pertanian, perikanan, dan kehutanan untuk mewujudkan daya saing produk pertanian, perikanan, dan kehutanan, dan peningkatan pendapatan petani, dan kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Adapun arah kebijakan strategis dari prioritas ini adalah:

1. Peningkatan produksi dan produktivitas pangan, pertanian, perikanan, dan kehutanan terus dilakukan untuk mendukung peningkatan ketersediaan pangan dan bahan baku industri. Beberapa kebijakan dan strategi dalam peningkatan produksi dan produktivitas komoditas pangan dan bahan baku industri PPK diarahkan untuk: (i) meningkatkan ketersediaan dan kualitas input produksi, antara lain benih/bibit, pupuk, pakan, lahan, kapal, alat mesin, dan sarana tangkap termasuk kebijakan subsidi yang lebih efisien; (ii) meningkatkan dukungan penelitian, ilmu pengetahuan, teknologi, dan teknologi terapan serta penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan; (iii) meningkatkan efektivitas pengendalian organisme pengganggu tanaman, peningkatan kesehatan hewan/ikan, dan pengembangan sistem perkarantina; (iv) mendorong investasi pangan, pertanian, perikanan, kehutanan, dan industri perdesaan yang berbasis produk lokal; (v) mencegah/mengurangi terjadinya alih fungsi lahan pertanian secara luas ke non pertanian serta konservasi sumber daya lahan dan air; (vi) memperluas areal lahan pertanian dan perikanan baru serta mengoptimalkan pemanfaatan lahan kering, lahan basah, dan lahan terlantar, termasuk lahan untuk pembudidayaan ikan dan perluasan wilayah tangkapan nelayan nasional ke ZEEI dan laut lepas; (vii) membenahi, menata, dan mengharmonisasikan peraturan perundangan untuk menjamin kepastian hukum atas lahan pertanian, perikanan, dan kehutanan, serta untuk meningkatkan penguasaan lahan oleh petani/nelayan/pembudidaya ikan; (viii) mengembangkan infrastruktur pertanian, perikanan, kehutanan, dan perdesaan seperti jalan produksi/ usahatani, jalan desa, pencetakan sawah, jaringan irigasi, saluran tambak, tata air mikro, *gully plug*, dam pengendali sedimentasi pelabuhan perikanan, dan infrastruktur perdesaan lainnya seperti transportasi, listrik, dan alat komunikasi; dan (ix) mengembangkan upaya mitigasi dan adaptasi terhadap dampak perubahan iklim di sektor pertanian, perikanan, dan kehutanan.
2. Peningkatan efisiensi distribusi pangan untuk menjamin agar seluruh rumah tangga dapat memperoleh pangan dalam jumlah dan kualitas yang cukup sepanjang waktu, dengan harga yang terjangkau. Fokus perhatian dalam

kebijakan dan strategi ini diarahkan untuk : (i) meningkatkan jumlah cadangan pangan pemerintah dan pemerintah daerah untuk stabilisasi harga; (ii) mengembangkan kebijakan perdagangan dan ekspor-impor untuk mendukung ketahanan pangan; (iii) meningkatkan sarana dan prasarana distribusi pangan agar lebih efisien dalam perdagangan dan mengurangi kerusakan bahan pangan; (iv) mengembangkan kebijakan dan peraturan daerah yang dapat memperlancar dan mengefisienkan distribusi pangan antar daerah/wilayah; serta (v) mengembangkan usaha pengolahan dan pemasaran produk pangan di perdesaan yang berbasis bahan pangan lokal.

3. Peningkatan pemenuhan kebutuhan konsumsi pangan menjadi kebijakan dan strategi pembangunan ketahanan pangan yang perlu memperoleh perhatian yang memadai agar pola pemanfaatan pangan secara nasional memenuhi kaidah mutu, keragaman, kandungan gizi, keamanan dan kehalalan. Arah kebijakan dan strategi operasional yang akan dilakukan meliputi: (i) mengembangkan penganekaragaman (diversifikasi) pengolahan dan konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal; (ii) meningkatkan konsumsi ikan dan diversifikasi produk perikanan; (iii) meningkatkan jumlah cadangan pangan pemerintah dan pemerintah daerah untuk keperluan bantuan pangan; (iv) meningkatkan kemampuan masyarakat dan pemerintah daerah dalam mengembangkan cadangan pangan; (v) meningkatkan pengetahuan dan perilaku masyarakat tentang pangan yang bergizi dan seimbang serta pola hidup sehat, terutama untuk memperbaiki status gizi ibu hamil dan anak balita; (vi) mengembangkan penelitian pangan dan gizi, serta industri pangan lokal; (vii) mengembangkan sistem mutu, kehalalan, dan keamanan pangan, termasuk pengendalian risiko penyakit zoonosis; (viii) meningkatkan pencegahan dan penanganan keadaan rawan pangan dan gizi karena keterbatasan akses, akibat adanya bencana alam dan bencana sosial; (ix) meningkatkan efisiensi dan efektivitas bantuan pangan/subsidi pangan kepada golongan masyarakat tertentu (masyarakat miskin, ibu hamil, balita gizi buruk); (x) mengembangkan jaringan antarlembaga masyarakat untuk pemenuhan hak atas pangan; serta (xi) meningkatkan efektivitas fungsi lembaga ketahanan pangan dan gizi, baik di pusat maupun daerah.
4. **Peningkatan nilai tambah, daya saing, dan pemasaran produk pertanian, perikanan, dan kehutanan.** Kebijakan dan strataegi ini diharapkan mampu mendorong terjadinya transformasi struktur ketenagakerjaan dari sektor pertanian secara luas ke sektor lain, serta mampu meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk pertanian, perikanan, dan kehutanan, baik di pasar domestik, Asia, maupun global. Kebijakan dan strategi ini diarahkan untuk: (i) meningkatkan mutu produk pertanian, perikanan dan kehutanan, serta efisiensi produksi; (ii) mengembangkan industri pengolahan (agroindustri) hasil pertanian, perikanan, dan kehutanan, serta jasa pendukungnya; (iii) membangun

dan merehabilitasi sarana dan prasarana distribusi dan pemasaran serta manajemen logistik dalam menjaga kesinambungan pasokan produk; (iv) mengembangkan sentra usaha pertanian, perikanan, dan kehutanan secara terpadu; (v) mengembangkan kebijakan perdagangan internasional yang mendukung peningkatan daya saing nasional; (vi) mengembangkan kebijakan perdagangan internasional dan peningkatan upaya diplomasi ke negara-negara pengimpor produk; (vii) meningkatkan pengendalian, pengawasan dan advokasi tentang mutu, keamanan, dan kehalalan produk pertanian, perikanan, dan kehutanan; serta (ix) meningkatkan kebijakan fiskal untuk “retool” industri kayu dan kayu olahannya.

5. **Peningkatan kapasitas masyarakat pertanian, perikanan, dan kehutanan.** Kebijakan dan strategi kebijakan yang ditujukan untuk mencapai arah kebijakan tersebut, yaitu: (i) meningkatkan pengetahuan petani/petani hutan/nelayan/petambak agar dapat meningkatkan kesejahteraannya; (ii) meningkatkan dan mengembangkan kelembagaan petani/petani hutan/nelayan/petambak; (iii) meningkatkan kuantitas dan kualitas penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan; (iv) mengembangkan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta diseminasinya kepada petani/nelayan/petambak; (v) merumuskan kebijakan pembangunan pertanian, perikanan, dan kehutanan yang mendukung petani/petani hutan/nelayan/petambak; (vi) mengembangkan sistem data dan informasi pembangunan pertanian, perikanan, dan kehutanan yang integratif dan mudah diakses oleh petani/nelayan/pembudidaya ikan; (vii) meningkatkan kemampuan/keterampilan serta penguatan dan pemberdayaan petani, nelayan dan pembudidaya ikan; dan (viii) memfasilitasi dan mendorong pengembangan kelembagaan pembiayaan dan asuransi bagi masyarakat pertanian, perikanan, dan kehutanan yang terjangkau.

Prioritas Bidang Ketahanan Pangan dan Revitalisasi Pertanian, Perikanan dan Kehutanan dituangkan dalam 5 fokus prioritas, yaitu: (1) Peningkatan Produksi dan Produktivitas untuk Menjamin Ketersediaan Pangan dan Bahan Baku Industri dari Dalam Negeri; (2) Peningkatan Efisiensi Sistem Distribusi dan Stabilisasi Harga Pangan; (3) Peningkatan Pemenuhan Kebutuhan Konsumsi Pangan; (4) Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, dan Pemasaran Produk Pertanian, Perikanan dan Kehutanan; serta (5) Peningkatan Kapasitas Masyarakat Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan.

10.3.2 Peningkatan Ketahanan dan Kemandirian Energi

Untuk mencapai sasaran dari segi ketahanan dan kemandirian, kebijakan umum peningkatan ketahanan dan kemandirian energi diarahkan pada tiga hal pokok, yaitu: (i) menjamin keamanan pasokan energi dengan meningkatkan (intensifikasi) eksplorasi, eksploitasi, dan optimasi produksi minyak dan gas bumi, serta eksplorasi untuk

meningkatkan cadangan minyak dan gas bumi, termasuk gas metana batubara; (ii) mengurangi ketergantungan yang berlebihan terhadap minyak bumi dengan menganekaragamkan atau diversifikasi energi primer, termasuk memanfaatkan EBT serta energi bersih; dan (iii) meningkatkan produktivitas pemanfaatan energi melalui gerakan efisiensi dan konservasi (penghematan), serta pemerataan penyediaan energi sesuai dengan kebutuhan dan daya beli masyarakat. Disamping itu, ketahanan dan kemandirian energi juga akan didukung oleh adanya kebijakan harga energi serta insentif yang rasional, artinya kebijakan harga energi yang secara bertahap menggambarkan nilai ekonomi energi.

Penghematan pemanfaatan energi terutama akan dilakukan untuk sektor-sektor yang mengkonsumsi energi yang besar seperti industri, pembangkit listrik dan transportasi. Dalam pelaksanaannya, kebijakan umum ini akan dilakukan secara integratif antara penguasaan teknologi energi, baik teknologi pencarian sumber daya energi (eksplorasi), pengambilan atau pemanfaatan energi (eksploitasi) maupun teknologi konversi dan distribusi energi. Selain itu pembangunan infrastruktur energi juga memegang peranan penting di dalam upaya meningkatkan penyaluran energi, terutama dalam upaya untuk meningkatkan penggunaan energi non-minyak bumi (diversifikasi).

Sebagai penjabaran lebih lanjut dari ketiga kebijakan umum tersebut, maka arah dan kebijakan strategi peningkatan ketahanan dan kemandirian energi dalam RPJMN 2010-2014 adalah sebagai berikut.

Peningkatan produksi dan cadangan minyak dan gas bumi melalui peningkatan daya tarik investasi eksplorasi dan eksploitasi terutama ditujukan untuk memenuhi kebutuhan baik itu bahan bakar dan bahan baku industri dalam negeri maupun sumber penerimaan devisa negara.

Beberapa kebijakan dan strategi yang akan dilakukan untuk: (i) mendorong penyelidikan dan pemetaan geologi untuk meningkatkan penguasaan data cadangan serta melakukan inventarisasi dan pemutakhiran data potensi pengembangan lapangan minyak bumi, gas bumi, dan gas metana batubara; (ii) menerapkan insentif yang lebih efektif untuk mendorong kegiatan eksplorasi dan eksploitasi minyak bumi, gas bumi, dan gas metana batubara, serta meningkatkan kualitas promosi dan penawaran lapangan minyak dan gas bumi serta pengawasan produksi dan pemanfaatan minyak dan gas bumi untuk kepentingan bahan baku, terutama pupuk dan petrokimia, di dalam negeri; (iii) mendorong pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan teknologi, terutama teknologi tinggi EOR (*enhanced oil recovery*) untuk memanfaatkan lapangan-lapangan minyak bumi yang sudah tua umurnya; dan (iv) meningkatkan transparansi, tata kelola, dan menghilangkan korupsi dan biaya yang tidak efisien di sektor hulu energi, yakni eksplorasi dan eksploitasi.

Peningkatan produktivitas dan pemerataan pemanfaatan energi dan penggunaan energi baru dan terbarukan ditujukan untuk peningkatan efisiensi penyediaan dan

pemanfaatan energi, penghematan penggunaan energi, peningkatan akses masyarakat akan energi, serta penggunaan sumber energi bukan fosil, seperti tenaga panas bumi, matahari, angin, dan sebagainya. Efisiensi di bidang penggunaan energi selain ditujukan untuk meningkatkan produksi nasional dengan menggunakan energi yang lebih rendah, juga dimaksudkan untuk menurunkan emisi karbon, memperbaiki daya saing dan mendorong perekonomian, serta meningkatkan kesejahteraan. Penyediaan energi secara merata sesuai dengan kebutuhan dan daya beli masyarakat dilakukan melalui penerapan diversifikasi energi serta peningkatan tingkat pelayanan jaringan distribusi serta akses energi.

Untuk meningkatkan produktifitas dan pemerataan pemanfaatan energi, beberapa kebijakan dan strategi yang akan dilakukan diarahkan untuk: (i) menyesuaikan harga energi melalui penyempurnaan subsidi BBM/LPG dan listrik untuk mendorong masyarakat pemakai energi menggunakan secara lebih hemat dan memperbesar akses pelayanan energi untuk masyarakat yang belum terlayani; (ii) menerapkan insentif-disinsentif secara tepat untuk mendorong penggunaan teknologi yang efisien pada kegiatan produksi (eksploitasi) energi primer; pengolahan (kilang minyak dan gas, pusat pembangkit listrik), penghantaran (sistem jaringan transmisi dan dsitribusi), serta pemakaian energi (transportasi, rumah tangga, listrik dan industri); (iii) mempromosikan budaya hemat energi ke berbagai kalangan masyarakat, termasuk pendidikan hemat energi sejak dini; (iv) menguatkan kelembagaan dan peraturan perundangan gerakan efisiensi dan konservasi energi; (v) meningkatkan kualitas pengawasan atas efisiensi fasilitas dan kegiatan produksi, pengolahan, penghantaran, dan konsumsi energi; (vi) menambah pasokan energi melalui pembangunan kilang minyak dan gas, infrastruktur pembangkit listrik, transmisi dan distribusi energi dengan mutu yang memadai; (vii) meningkatkan kompetisi yang sehat dan transparan di sektor hilir energi, agar tercapai pelayanan yang baik dan harga yang rasional dan terjangkau bagi masyarakat luas; (viii) meningkatkan efisiensi produksi dan distribusi energi sehingga terdapat tambahan energi yang dapat disediakan bagi masyarakat yang belum memiliki pelayanan energi.

Untuk meningkatkan penggunaan energi baru dan terbarukan, serta energi bersih, beberapa kebijakan dan strategi yang akan dilakukan diarahkan untuk (i) mendorong pemanfaatan panas bumi untuk pembangkit tenaga listrik skala menengah dan besar; (ii) mendorong pemanfaatan mikrohidro untuk pembangkit listrik skala kecil dan menengah, terutama di daerah-daerah yang tidak terjangkau oleh sistem jaringan kelistrikan nasional; (ii) mendorong pemanfaatan bahan bakar nabati, dengan penanamannya pada wilayah-wilayah yang memiliki lahan tidak terpakai namun luas dan memiliki potensi produksi pertanian yang tinggi; dan (iii) mendorong pemanfaatan tenaga surya dan angin pada daerah/kepulauan terpencil dan daerah-daerah dengan tingkat ketersediaan energi yang masih rendah namun memiliki intensitas sinar matahari/angin yang cukup tinggi seperti NTT, NTB, Papua, Maluku, dan sebagainya.

Prioritas bidang Peningkatan Ketahanan dan Kemandirian Energi, dituangkan

dalam 2 fokus prioritas, yaitu: (1) Peningkatan Produksi dan Cadangan Minyak Bumi dengan indikator persentase peranan gas bumi, batubara dalam bauran energi primer, jumlah produksi minyak dan gas bumi, serta gas metana batubara, jumlah cadangan minyak bumi, gas, dan metana batubara; (2) Peningkatan Produktivitas Pemanfaatan dan Pemerataan Energi dengan indikator jumlah produksi BBN, yakni bio-diesel dan bio-ethanol, dan penggunaannya dalam pemakaian bahan bakar secara nasional, penggunaan panas bumi PLTP, mikrohidro PLTMH, tenaga surya dan angin untuk pembangkit listrik, elastisitas dan intensitas energi, persentase penghematan energi, dan penurunan emisi karbondioksida CO₂ yang bersumber dari penggunaan energi.

10.3.3 Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Mineral dan Pertambangan

Untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan, kebijakan umum pembangunan pertambangan mineral dan batubara diarahkan pada dua hal pokok, yaitu: (i) meningkatkan produksi dan nilai tambah produk tambang mineral dan batubara; dan (ii) mengurangi dampak negatif akibat kegiatan pertambangan dan bencana geologi. Sebagai penjabaran lebih lanjut dari kedua hal pokok tersebut, maka arah kebijakan dan strategi pembangunan pertambangan mineral dan batubara dalam RPJMN 2010-2014 adalah sebagai berikut:

Peningkatan produksi nilai tambah produk tambang mineral dan batubara ditujukan untuk memenuhi kebutuhan bahan baku dan bahan bakar terutama untuk industri di dalam negeri. Beberapa kebijakan dan strategi yang akan dilakukan diarahkan untuk: (i) memberikan insentif fiskal (*fiscal regime*) yang stabil dan kompetitif dalam menarik investasi pertambangan mineral dan batubara; (ii) memperbaiki dan menyederhanakan birokrasi perijinan (*licensing regime*) perusahaan pertambangan; (iii) memperjelas pembagian kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah terutama yang berkaitan dengan pemberian izin dalam perusahaan pertambangan; (iv) mengembangkan informasi potensi dan wilayah cadangan; (v) meningkatkan kemampuan teknis dan managerial aparat pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan perijinan dan inventarisasi cadangan; (vi) menciptakan keamanan usaha dan berusaha dalam perusahaan pertambangan mineral dan batubara; (vii) mengembangkan industri pengolahan dan pemurnian (*smelter*) untuk mengubah bahan-bahan mentah mineral logam dan non logam menjadi bahan setengah jadi atau bahkan menjadi bahan yang final; (viii) meningkatkan produksi batubara serta pemanfaatannya untuk kepentingan dalam negeri (*domestic market obligation*) terutama sebagai bahan bakar pembangkit tenaga listrik; (ix) mendorong berkembangnya industri *oil synthetic* dan *clean-coal technology*, serta industri peningkatan mutu batubara (*upgraded brown coal*), pencairan batubara (*coal liquefaction*) dan gasifikasi batubara (*coal gasification*); (x) meningkatkan produksi uap panas bumi melalui kegiatan eksplorasi dan eksploitasi panas bumi; dan (xi) mendorong pemanfaatan panas bumi untuk pembangkit tenaga listrik;

Pengurangan dampak negatif akibat dari kegiatan pertambangan dan bencana

geologi dilakukan untuk mencegah kerusakan lingkungan, baik air, tanah, maupun udara, yang berlebihan akibat kegiatan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya mineral dan batubara, dengan memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan hidup termasuk mengurangi emisi gas rumah kaca yang berpotensi menyebabkan perubahan iklim global. Beberapa kebijakan dan strategi yang akan dilakukan diarahkan untuk: (i) mencegah kerusakan dan pencemaran lingkungan melalui pembinaan lindungan lingkungan, keselamatan operasi, dan usaha penunjang bidang migas; (ii) mencegah kerusakan cadangan mineral dan batubara serta mengembangkan wilayah pencadangan tambang nasional dengan melakukan *best mining practices* dan menerapkan mekanisme *depletion premium*; (iii) meningkatkan rehabilitasi kawasan bekas tambang; dan (iv) mitigasi, pengembangan teknologi, dan fasilitasi dalam rangka penetapan langkah-langkah penanggulangan krisis energi dan bencana geologi.

Prioritas Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Mineral dan Pertambangan diuraikan dalam 2 fokus yaitu: (1) Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Produk Pertambangan Mineral dan Batubara, dengan indikator produksi batubara dan *Domestic Market Obligation* dari batubara, produksi mineral, seperti emas, perak, timah, nikel, feronikel dan nikel matte, bauksit, konsentrat tembaga, dan bijih besi, serta persentase pemanfaatannya untuk bahan baku industri dalam negeri, jumlah WKP dan WP; dan (2) Pengurangan Dampak Negatif Akibat Kegiatan Pertambangan dan Bencana Geologi, dengan indikator penyediaan peta geologi daerah bahaya seluruh gunung api, pemetaan geofisika udara di Pulau Kalimantan dan Sulawesi, peta dasar geologi bagi daerah-daerah pusat pertumbuhan ekonomi di Pulau Jawa, pemetaan geologi teknik tata ruang, dan reklamasi kawasan bekas tambang, pengurangan volume gas flare, limbah, dan peningkatan penggunaan bahan-bahan kimia ramah lingkungan.

10.3.4 Perbaikan Kualitas Lingkungan Hidup

Pembangunan di bidang lingkungan hidup merupakan perwujudan dari Visi “Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil dan Makmur” dan Misi Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 butir ke enam yaitu “Mewujudkan Indonesia asri dan lestari”. Dalam RPJPN, prioritas kebijakan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup pada RPJM 2010-2014 diarahkan pada: (1) penguatan kelembagaan dan peningkatan kesadaran masyarakat yang ditandai dengan berkembangnya proses rehabilitasi dan konservasi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang disertai dengan menguatnya partisipasi aktif masyarakat; (2) terpeliharanya keanekaragaman hayati dan kekhasan sumber daya alam tropis lainnya yang dimanfaatkan untuk mewujudkan nilai tambah, daya saing bangsa, serta modal pembangunan nasional pada masa yang akan datang; (3) mantapnya kelembagaan dan kapasitas antisipatif serta penanggulangan bencana di setiap tingkatan pemerintahan; (4) terlaksananya pembangunan kelautan sebagai gerakan yang didukung oleh semua sektor.

Dalam rangka mendukung arah kebijakan dalam RPJP dan memperhatikan

kondisi umum lingkungan hidup saat ini, maka diperlukan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup yang terintegrasi dari hulu ke hilir dan didukung oleh program-program lintas sektor. Kebijakan ini diarahkan untuk mendukung pencapaian sasaran prioritas yaitu mengelola daya dukung dan memulihkan kualitas daya tampung lingkungan hidup. Untuk mengelola daya dukung dan memulihkan kualitas daya tampung lingkungan hidup, kerangka regulasi diarahkan untuk mewujudkan lingkungan hidup yang dapat mendukung program pembangunan nasional yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Arah kebijakan ini akan dicapai dengan strategi : 1) pengendalian dan pemantauan pencemaran pada air, lahan, udara, dan keanekaragaman hayati (kehati); 2) perbaikan kerangka regulasi dan peningkatan upaya penegakan hukum lingkungan secara konsisten; 3) perbaikan kualitas lingkungan melalui upaya rehabilitasi dan konservasi serta pemanfaatan teknologi yang ramah lingkungan; 4) penataan dan pengelolaan lingkungan yang harmonis dari hulu ke hilir; 5) peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan penguatan institusi pengelola lingkungan hidup; 6) peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat; 7) pengembangan penelitian pengelolaan lingkungan; 8) penyelesaian konflik pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup; dan 9) pengembangan sumber-sumber pendanaan lingkungan alternatif.

Selanjutnya, Prioritas Perbaikan Kualitas Lingkungan Hidup ini diuraikan dalam 2 fokus prioritas yaitu: (1) Pengendalian Pencemaran dan Pengrusakan Lingkungan Hidup, dengan indikator kinerja menurunnya tingkat pencemaran lingkungan dan meningkatnya usaha-usaha pengendalian perusakan lingkungan; dan (2) Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, dengan indikator kinerja meningkatnya kapasitas kelembagaan, partisipasi masyarakat, dan ketersediaan data dan informasi untuk pengelolaan lingkungan hidup.

10.3.5 Peningkatan Konservasi dan Rehabilitasi Sumber Daya Hutan

Pembangunan sumber daya hutan ke depan tidak lagi difokuskan pada pemanfaatan kayu saja, tetapi perlu melihat manfaat hutan dalam mempertahankan keseimbangan siklus hidrologi. Karena itu, selain harus menerapkan konsep pembangunan hutan yang berkelanjutan dalam pengelolaan kawasan hutan yang tersisa maka upaya rehabilitasi kawasan hutan dan lahan kritis serta perlindungan dan konservasi sumber daya hutan pada DAS harus menjadi prioritas nasional. Hal ini diperlukan untuk meningkatkan daya dukung dan fungsi DAS dalam rangka menjamin ketersediaan air.

Kebijakan konservasi dan rehabilitasi sumber daya hutan, dalam lima tahun ke depan, diarahkan untuk: (i) Memantapkan status hukum dan peningkatan kapasitas pengelolaan kawasan hutan; (ii) Memantapkan kelembagaan dalam pengelolaan sumber daya hutan; (iii) Memelihara dan meningkatkan daya dukung dan fungsi lingkungan; (iv) Memantapkan fungsi konservasi alam dengan peningkatan kualitas pengelolaan Taman Nasional dan Kawasan Konservasi lainnya, pemanfaatan keanekaragaman hayati dan

tumbuhan dan satwa liar (TSL); (v) Meningkatkan pengembangan pemanfaatan jasa lingkungan hutan dan wisata alam; (vi) Meningkatkan perlindungan hutan melalui kegiatan pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan serta meningkatkan perlindungan dan pengamanan hutan dari berbagai ancaman (*illegal logging*, perambahan, perdagangan TSL illegal); (vii) Meningkatkan kapasitas pengelolaan kawasan konservasi melalui peningkatan kelembagaan pengelola kawasan konservasi, kemandirian dan produktivitas, (viii) Meningkatkan akses dan keterkaitan masyarakat dalam kegiatan konservasi yang dilaksanakan melalui *collaborative management* dan pemberdayaan masyarakat di sekitar hutan; (ix) Meningkatkan daya dukung dan fungsi DAS dalam rangka menjamin ketersediaan air.

Prioritas Peningkatan Konservasi dan Rehabilitasi Sumber Daya Hutan diuraikan dalam 4 fokus yaitu: (1) Pemantapan Kawasan Hutan, dengan indikator kinerja jumlah Surat Keputusan (SK) penunjukkan kawasan hutan, selesainya penunjukan kawasan pengganti prosentase dari proses tukar menukar kawasan hutan dengan kawasan kompensasi, selesainya batas luar kawasan hutan konservasi dan hutan lindung, meningkatnya jumlah patok tanda batas (dalam persen) yang terpetakan, beroperasinya KPH; (2) Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Perlindungan Hutan dengan indikator kinerja menurunnya kebakaran hutan, meningkatnya jumlah regu masyarakat peduli api, meningkatnya batas KPA, KSA, TB dan HL yang telah disinkronkan, menguatnya kelembagaan pengelolaan kawasan konservasi serta PNBP jasa lingkungan (air, karbon dan panas bumi); (3) Peningkatan Fungsi DAS dengan indikator jumlah rencana pengelolaan DAS prioritas secara terpadu dan rehabilitasi hutan; serta (4) Pengembangan Penelitian dan Iptek Sektor Kehutanan dengan indikator produk iptek, data dan informasi kehutanan.

10.3.6 Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan

Kebijakan pengelolaan sumber daya **kelautan**, dalam lima tahun ke depan, diarahkan untuk: (1) mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya kelautan untuk pembangunan; dan (2) Meningkatkan fungsi laut sebagai sistem penyangga kehidupan dan penyedia pangan dunia.

Secara spesifik arah kebijakan dan strategi pengelolaan sumber daya kelautan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan rehabilitasi, konservasi, pengendalian dan pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan, yang dilakukan melalui upaya: (i) membangun sistem pengendalian dan pengawasan dalam pengelolaan sumber daya laut dan pesisir, yang disertai dengan penegakan hukum yang konsisten; (ii) meningkatkan upaya penanganan praktek *IUU Fishing* dan kegiatan perikanan yang merusak; (iii) meningkatkan sarana dan prasarana pengawasan dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan; (iv) pengendalian pencemaran dan perusakan

lingkungan hidup di wilayah pesisir, dan laut; (v) meningkatkan konservasi dan rehabilitasi ekosistem pesisir yang meliputi terumbu karang, mangrove dan padang lamun.

2. Meningkatkan pendayagunaan sumber daya laut, pesisir dan pulau-pulau kecil serta tata kelola sumber daya kelautan, yang dilakukan dengan upaya: (i) menetapkan kebijakan pembangunan kelautan dan negara kepulauan secara terpadu; (ii) Menerapkan prinsip-prinsip manajemen pesisir terpadu (*integrated coastal management*, ICM) di wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil; (iii) mengelola dan mendayagunakan pulau-pulau kecil dan pulau-pulau terdepan; (iv) mengoperasionalkan Rencana Tata Ruang/Zonasi wilayah pesisir sesuai dengan hirarki perencanaan sebagai acuan koordinasi dan sinkronisasi pembangunan antar sektor dan antar wilayah; (v) upaya adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim serta bencana alam laut; dan (vi) meningkatkan kerja sama internasional, regional, dan antardaerah dalam pengelolaan sumber daya kelautan
3. Mengembangkan Iptek Kelautan, yang diupayakan melalui: (i) meningkatkan kuantitas dan kualitas riset dan pengembangan teknologi kelautan, serta riset sumber daya non hayati lainnya; (ii) Peningkatan penerapan hasil-hasil riset teknologi kelautan untuk mendukung pembangunan kelautan; (iii) peningkatkan sarana dan prasarana pelaksanaan penelitian dan pengembangan; dan (iv) meningkatkan penyediaan informasi dan statistik kelautan yang tepat dan akurat.

Prioritas Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan ini diuraikan dalam 3 fokus prioritas yaitu: (1) Peningkatan Rehabilitasi, Konservasi, Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, dengan indikator luas wilayah konservasi laut dan tingkat ketaatan dalam pemanfaatan SDKP; (2) Pendayagunaan Laut, Pesisir, Pulau-pulau Kecil dan Pulau-Pulau Terdepan, dengan indikator terintegrasinya pengelolaan wilayah laut, pesisir, pulau-pulau kecil, pengelolaan pulau-pulau terdepan dan tingkat implementasi adaptasi dan mitigasi bencana di wilayah pesisir, pulau-pulau kecil serta Tertatanya wilayah pesisir; dan (3) Inovasi Riset dan Teknologi Terapan Kelautan, dengan indikator pengembangan Iptek dasar dan aplikasi Iptek terapan.

10.3.7 Peningkatan Kualitas Informasi Iklim dan Bencana Alam serta Kapasitas Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim

Kebijakan untuk mengantisipasi dampak perubahan iklim dan bencana alam dalam tahun 2010 – 2014 diarahkan untuk mewujudkan peningkatan kapasitas penanganan dampak perubahan iklim dan bencana alam yang cepat, tepat dan akurat. Sedangkan strategi untuk mencapai kebijakan ini adalah: (i) peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan penguatan kelembagaan; (ii) peningkatan akurasi jangkauan



dan kecepatan penyampaian informasi dengan menambah dan membangun jaringan observasi, telekomunikasi dan sistem kalibrasi; (iii) pendirian Pusat Basis Data dan informasi yang terintegrasi; (iv) peningkatan kerja sama dan mengembangkan penelitian mengenai perubahan iklim dan resiko bencana alam; (v) penyediaan peta kerentanan wilayah Indonesia terhadap dampak perubahan iklim; (vi) pendirian stasiun monitoring perubahan iklim di seluruh wilayah Indonesia; (vii) pengembangan kebijakan dan peraturan perundangan mengenai perubahan iklim dan kebencanaan.

Prioritas Peningkatan Kualitas Informasi Iklim dan Bencana Alam serta Kapasitas Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim dijabarkan dalam 3 fokus prioritas, yaitu: (1) Peningkatan Kualitas Informasi Iklim, Cuaca dan Bencana Alam Lainnya, dengan indikator meningkatnya kapasitas pelayanan serta ketersediaan data dan informasi iklim, cuaca dan bencana alam lainnya yang cepat dan akurat; (2) Peningkatan Adaptasi dan Mitigasi terhadap Perubahan Iklim, dengan indikator meningkatnya kemampuan adaptasi dan mitigasi para pihak dalam menghadapi dampak perubahan iklim; dan (3) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penanganan Perubahan Iklim, dengan indikator menguatnya kapasitas institusi dalam mengantisipasi dan menangani dampak perubahan iklim

RENCANA TINDAK PRORITAS BIDANG SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP

BIDANG PEMBANGUNAN : SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP

PRIORITAS BIDANG: Ketahanan Pangan dan Revitalisasi Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan

NO	FOKUS PRIORITAS /KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil Outcomes/Output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
1.	PENINGKATAN PRODUKSI DAN PRODUKTIVITAS UNTUK MENJAMIN KETERSEDIAAN PANGAN DAN BAHAN BAKU INDUSTRI DARI DALAM NEGERI	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya produksi dan produktivitas komoditas pangan, pertanian, perikanan dan kehutanan • Meningkatnya cadangan pangan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat. 						41.653,7
a.	Pengelolaan produksi tanaman sereal	Meningkatnya perluasan penerapan budidaya tanaman sereal yang tepat dan berkelanjutan untuk peningkatan produksi melalui peningkatan produktivitas per satuan luas.	Luas areal penerapan budidaya sereal yang tepat dan berkelanjutan (ribu ha) : SLPTT padi non hibrida (ribu ha) SLPTT padi hibrida (ribu ha) SLPTT Padi lahan kering (ribu ha) SLPTT Jagung hibrida (ribu ha) Pengembangan peningkatan produksi gandum (ribu ha) Pengembangan peningkatan produksi sorghum (ribu ha) Peta sentra produksi komoditas sereal (paket) Data luas tanam komoditas sereal	2650,2 2000 200 300 150 0,1 0,1 1 1	3750,4 2500 500 500 250 0,2 0,2 1 1	Program Peningkatan Produksi, Produktivitas Dan Mutu Tanaman Pangan Untuk Mencapai Swasembada Dan Swasembada Berkelanjutan	Kementan	2.259,0

BIDANG PEMBANGUNAN : SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP
PRIORITAS BIDANG: Ketahanan Pangan dan Revitalisasi Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan

NO	FOKUS PRIORITAS /KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil Outcomes/Output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
b.	Pengelolaan produksi tanaman kacang-kacangan dan umbi-umbian	Meningkatnya perluasan penerapan budidaya tanaman kacang-kacangan dan umbi-umbian yang tepat dan berkelanjutan untuk peningkatan produksi melalui peningkatan produktivitas per satuan luas.	Luas areal penerapan budidaya tanaman kacang-kacangan dan umbi-umbian yang tepat dan berkelanjutan (ribu ha) : SLPTT kedelai (ribu ha) SLPTT kacang tanah (ribu ha) SLPTT kacang hijau (ribu ha) PTT kacang hijau (ribu ha) PTT ubi kayu (ribu ha) PTT ubi jalar (ribu ha) PTT pangan lokal (ribu ha) Peta sentra produksi beberapa komoditas kabi (paket) Data luas tanam beberapa komoditas kabi (paket)	319,29 250 50 - 3,21 6,53 9,5 0,05 1 1	742,91 500 200 25 - 6,61 11,2 0,1 1 1	Program Peningkatan Produksi, Produktivitas Dan Mutu Tanaman Pangan Untuk Mencapai Swasembada Dan Swasembada Berkelanjutan	Kementan	1.256,5
c.	Pengelolaan sistem penyediaan benih tanaman pangan	Terselenggaranya sistem pembinaan lembaga perbenihan tanaman pangan yang efisien dan berkelanjutan di lokasi penerapan budidaya tanaman pangan yang tepat	Lembaga perbenihan tanaman pangan yang dibina di lokasi penerapan budidaya tanaman pangan yang tepat : BPSBTPH (Balai) BBI (Balai)	 32 31	 32 31	Program Peningkatan Produksi, Produktivitas Dan Mutu Tanaman Pangan Untuk Mencapai Swasembada Dan Swasembada Berkelanjutan	Kementan	334,0
d.	Penyaluran subsidi benih tanaman pangan	Tersaluranya benih tanaman pangan bersubsidi	Jumlah benih tanaman pangan bersubsidi (ribu ton)	178,18	226,92	Program Peningkatan Produksi, Produktivitas Dan Mutu Tanaman Pangan Untuk Mencapai Swasembada Dan Swasembada Berkelanjutan	Kementan	

BIDANG PEMBANGUNAN : SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP
PRIORITAS BIDANG: Ketahanan Pangan dan Revitalisasi Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan

NO	FOKUS PRIORITAS /KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil Outcomes/Output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
e.	Pengelolaan sistem penyediaan dan pengawasan sarana produksi tanaman pangan	Terselenggaranya sistem penyediaan dan pengawasan sarana produksi tanaman pangan yang efisien dan berkelanjutan di lokasi penerapan budidaya tanaman pangan yang tepat.	Sarana produksi tersedia dan terawasi di lokasi penerapan budidaya tanaman pangan yang tepat (unit) :	13.836	18.354	Program Peningkatan Produksi, Produktivitas Dan Mutu Tanaman Pangan Untuk Mencapai Swasembada Dan Swasembada Berkelanjutan	Kementan	735,7
			Bantuan RPPPO (unit)	200	1200			
			Bantuan Traktor R-2 (unit)	623	912			
			Bantuan Traktor R-4 (unit)	7	10			
			Bantuan pompa air (unit)	350	512			
			Penguatan UPJA semula (unit)	8.747	8.071			
			Penguatan UPJA berkembang (unit)	2.864	4.313			
			Penguatan UPJA profesional (unit)	585	2792			
			Penguatan kP3 (unit)	430	514			
			Penguatan PPNS Pupas (orang)	30	30			
			Skrening pestisida (unit)		30			
			Tersusunnya roadmap kebutuhan dan penyediaan pupuk dan alsintan (paket)		1			

BIDANG PEMBANGUNAN : SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP
PRIORITAS BIDANG: Ketahanan Pangan dan Revitalisasi Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan

NO	FOKUS PRIORITAS /KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil Outcomes/Output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
f.	Penyaluran pupuk bersubsidi	Tersalurinya pupuk bersubsidi	Jumlah pupuk bersubsidi (juta ton)	11,1	12,2	Program Peningkatan Produksi, Produktivitas Dan Mutu Tanaman Pangan Untuk Mencapai Swasembada Dan Swasembada Berkelanjutan	Kementan	
g.	Penguatan perlindungan tanaman pangan dari gangguan OPT dan DFI	Terkendalinya serangan OPT dan DFI di lokasi penerapan budidaya tanaman pangan yang tepat	Jumlah luas areal tanaman pangan yang terserang OPT (ribu ha) dan	59	89,5	Program Peningkatan Produksi, Produktivitas Dan Mutu Tanaman Pangan Untuk Mencapai Swasembada Dan Swasembada Berkelanjutan	Kementan	526,3
			Jumlah luas areal tanaman pangan yang terkena DFI (ribu ha)	88,5	134,25			
h.	Pengembangan metode pengujian mutu benih dan penerapan sistem mutu laboratorium pengujian benih	Berkembangnya metode pengujian mutu benih dan penerapan sistem mutu laboratorium pengujian benih tanaman pangan dan hortikultura	Jumlah metode pengujian mutu benih yang dikembangkan, divalidasi dan disyahkan (metode)	8	8	Program Peningkatan Produksi, Produktivitas Dan Mutu Tanaman Pangan Untuk Mencapai Swasembada Dan Swasembada Berkelanjutan	Kementan	37,2
			Jumlah laboratorium yang menerapkan sistem mutu (laboratorium)	8	8			
			Jumlah laboratorium peserta uji profisiensi (laboratorium)	30	30			
			Jumlah pelaksanaan uji petik mutu benih yang beredar (contoh benih)	15	25			

BIDANG PEMBANGUNAN : SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP
PRIORITAS BIDANG: Ketahanan Pangan dan Revitalisasi Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan

NO	FOKUS PRIORITAS /KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil Outcomes/Output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
i.	Pengembangan peramalan serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan	Tersedianya informasi dan model peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) sebagai rujukan dalam pengamanan produksi tanaman pangan dan hortikultura	Jumlah informasi peramalan serangan OPT (unit) Jumlah teknologi pengamatan, peramalan dan pengendalian OPT (model) Jumlah propinsi yang menerapkan teknologi pengamatan, peramalan dan pengendalian OPT (provinsi)	5 8 6	5 8 18	Program Peningkatan Produksi, Produktivitas Dan Mutu Tanaman Pangan Untuk Mencapai Swasembada Dan Swasembada Berkelanjutan	Kementan	44,6
j.	Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Buah Berkelanjutan	Berkembangnya sistem agribisnis yang efisien dan berkelanjutan yang mampu menyediakan produk buah yang cukup, bermutu dan aman konsumsi	Laju pertumbuhan produksi tanaman buah Proporsi produk buah bermutu di pasar	5% 20%	5,60% 50%	Program Peningkatan Produksi, Produktivitas Dan Mutu Produk Tanaman Hortikultura Berkelanjutan	Kementan	429,9
k.	Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Sayuran dan Biofarmaka Berkelanjutan	Berkembangnya sistem agribisnis yang efisien dan berkelanjutan yang mampu menyediakan produk sayuran dan biofarmaka yang cukup, bermutu dan aman konsumsi	Laju pertumbuhan produksi Tanaman Sayuran dan Biofarmaka (naik terhadap tahun sebelumnya) Laju pertumbuhan luas panen Tanaman sayuran dan biofarmaka (naik terhadap tahun sebelumnya)	3,50% 2,50%	4,20% 2,50%	Program Peningkatan Produksi, Produktivitas Dan Mutu Produk Tanaman Hortikultura Berkelanjutan	Kementan	442,0
l.	Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Hias Berkelanjutan	Berkembangnya sistem agribisnis yang efisien dan berkelanjutan yang mampu menyediakan produk tanaman hias yang cukup, bermutu dan aman konsumsi	Laju pertumbuhan produksi Tanaman Hias Proporsi tanaman hias segar bermutu di pasar	6,5 10	6,5 20	Program Peningkatan Produksi, Produktivitas Dan Mutu Tanaman Pangan Untuk Mencapai Swasembada Dan Swasembada Berkelanjutan	Kementan	447,8

BIDANG PEMBANGUNAN : SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP
PRIORITAS BIDANG: Ketahanan Pangan dan Revitalisasi Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan

NO	FOKUS PRIORITAS /KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil Outcomes/Output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
m.	Pengembangan sistem perbenihan, pupuk dan sarana produksi lainnya	Peningkatan usaha/produsen benih, pupuk dan sarana produksi lainnya guna mendukung keberlanjutan ketersediaan produk hortikultura yang berdaya saing.	% jumlah usaha/produsen benih hortikultura * buah (%) * Sayuran (%) * Tanaman Hias (%) * Biofarmaka (%) % penggunaan benih bermutu * buah (%) * Sayur umbi (%) * Sayur biji (%)	3 2 1 2 60 17 75,2	3 2 1 2 80 30 80,9	Program Peningkatan Produksi, Produktivitas Dan Mutu Produk Tanaman Hortikultura Berkelanjutan	Kementan	312,9
n.	Pengembangan Sistem Perlindungan Tanaman Hortikultura	Berkembangnya sistem perlindungan tanaman dalam mendukung pengembangan agribisnis hortikultura	Proporsi luas serangan OPT utama hortikultura terhadap total luas panen. (maksimal terhadap Luas panen)	5%	5%	Program Peningkatan Produksi, Produktivitas Dan Mutu Produk Tanaman Hortikultura Berkelanjutan	Kementan	281,1

BIDANG PEMBANGUNAN : SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP
PRIORITAS BIDANG: Ketahanan Pangan dan Revitalisasi Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan

NO	FOKUS PRIORITAS /KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil Outcomes/Output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
o.	Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman semusim	Terfasilitasinya pengembangan budidaya tanaman semusim (tebu,kapas, tembakau dan nilam)	Capaian luas areal (ribu hektar) pembinaan dan pengembangan tanaman semusim : - Swasembada Gula Nasional Ø Tebu - Pengembangan komoditas Pemenuhan konsumsi Dalam Negeri Ø kapas - Pengembangan komoditas Ekspor Ø Tembakau Ø Nilam	465 15 205 14	641 25 205 18	Program Peningkatan Produksi, Produktivitas Dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan	Kementan	251,8

BIDANG PEMBANGUNAN : SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP
PRIORITAS BIDANG: Ketahanan Pangan dan Revitalisasi Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan

NO	FOKUS PRIORITAS /KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil Outcomes/Output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
p.	Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman rempah dan penyegar	Terfasilitasinya pengembangan budidaya tanaman rempah dan penyegar (kopi, teh, kakao, lada, cengkeh)	<p>Peningkatan luas areal (ribu hektar) pembinaan dan pengembangan tanaman rempah dan penyegar :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan komoditas Ekspor Ø kopi 1291 1354 Ø Teh 129 130 Ø kakao 1655 2020 Ø Lada 192 196 - Pengembangan komoditas Pemenuhan konsumsi Dalam Negeri Ø Cengkeh 465 484 - Gerakan Peningkatan Produksi dan Mutu kakao Nasional (ribu ha) Rehabilitasi 81,85 10 Intensifikasi 30,55 20 Peremajaan 22,6 5 Pengendalian OPT 135 35 Pemberdayaan petani (kelompok Tani) 6.750 1.750 			Program Peningkatan Produksi, Produktivitas Dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan	Kementan	1.254,6

BIDANG PEMBANGUNAN : SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP
PRIORITAS BIDANG: Ketahanan Pangan dan Revitalisasi Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan

NO	FOKUS PRIORITAS /KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil Outcomes/Output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
q.	Dukungan penyediaan benih unggul bermutu dan sarana produksi perkebunan	Terfasilitasinya penyediaan benih unggul bermutu dalam rangka mendukung peningkatan produktivitas dan mutu tanaman perkebunan	<ul style="list-style-type: none"> · Jumlah penggunaan benih unggul bermutu dan sarana produksi perkebunan (%) Jumlah penggunaan benih unggul bermutu 	45	60	Program Peningkatan Produksi, Produktivitas Dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan	Kementan	169,4
r.	Dukungan perlindungan perkebunan dan penanganan gangguan usaha perkebunan	Terfasilitasinya pengamatan dan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT) tanaman perkebunan pada 13 komoditas perkebunan	<ul style="list-style-type: none"> · Revitalisasi Perlindungan Perkebunan - Areal pengendalian OPT dan intensitas serangan OPT (ha) Ø Penanganan gangguan usaha perkebunan · Jumlah luas areal perkebunan yang terkena dampak perubahan iklim (ha) 	51.467 36 -	54.841 44 8.000	Program Peningkatan Produksi, Produktivitas Dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan	Kementan	127,3
s.	Dukungan pengujian dan pengawasan mutu benih serta penerapan teknologi proteksi tanaman perkebunan	<p>Terlaksananya pengawasan dan pengujian benih tanaman perkebunan</p> <p>Terlaksananya penerapan teknologi proteksi tanaman perkebunan</p>	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah bibit yang tersertifikasi (dalam 1.000 batang) Ø Jumlah bibit yang tersertifikasi (dalam 1.000 batang) · Eksplorasi dan inventarisasi koleksi, teknik perbanyakan/pengembangan pelepasan dan evaluasi pemanfaatan musuh alami, agens hayati dan pestisida nabati Ø Jumlah teknologi terapan perlindungan perkebunan (paket) 	201.542 19	255.869 25	Program Peningkatan Produksi, Produktivitas Dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan	Kementan	352,8

BIDANG PEMBANGUNAN : SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP
PRIORITAS BIDANG: Ketahanan Pangan dan Revitalisasi Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan

NO	FOKUS PRIORITAS /KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil Outcomes/Output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
t.	Peningkatan kuantitas dan kualitas benih/bibit dengan mengoptimalkan sumber daya lokal	Peningkatan kualitas dan kuantitas benih dan bibit ternak (sapi potong, sapi perah, domba, kambing, ayam buras, itik) yang bersertifikat melalui: <ul style="list-style-type: none"> · Penguatan kelembagaan perbibitan yang menerapkan <i>Good Breeding Practices</i> · Peningkatan penerapan standar mutu benih dan bibit ternak · Peningkatan penerapan teknologi perbibitan · Pengembangan usaha dan investasi perbibitan 	<ul style="list-style-type: none"> · Peningkatan kuantitas semen (dosis) · Peningkatan produksi embrio · Bibit sapi · Bibit unggas lokal · Bibit kambing/domba 	2.700	4.000	Program Pencapaian Swasembada Daging Sapi Dan Peningkatan Penyediaan Pangan Hewani Yang Aman, Sehat, Utuh Dan Halal	Kementan	1.021,0
				400	700			
				2.625	4.150			
				60.000	84.800			
				2.000	2.820			

BIDANG PEMBANGUNAN : SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP
PRIORITAS BIDANG: Ketahanan Pangan dan Revitalisasi Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan

NO	FOKUS PRIORITAS /KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil Outcomes/Output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
u.	Peningkatan produksi ternak ruminansia dengan pendayagunaan sumber daya lokal	Meningkatnya populasi dan produksi ternak ruminansia	<p>Peningkatan produksi dan produktivitas ternak (sapi ekor)</p> <p>Swasembada daging sapi (share produk dalam negeri %)</p> <p>Pemanfaatan kotoran ternak menjadi pupuk organik dan pemberian paket bantuan sosial pupuk organik (rumah kompos) (Dampak Perubahan Iklim)</p> <p>Pengembangan dan pembinaan Biogas Asal Ternak Bersama Masyarakat (BATAMAS) terutama di sentra terpencil dan padat ternak (unit) (Dampak Perubahan Iklim)</p> <p>Pengembangan integrasi ternak dan tanaman melalui pengelolaan kotoran ternak (padat dan cair) menjadi pupuk organik dan pengolahan limbah tanaman untuk ternak terutama di sentra perkebunan, tanaman pangan dan horti kulture (kelompok) (Dampak Perubahan Iklim)</p>	21.000	31.625	Program Pencapaian Swasembada Daging Sapi Dan Peningkatan Penyediaan Pangan Hewani Yang Aman, Sehat, Utuh Dan Halal	Kementan	2.418,7
				76	90			
				0	10.000			
				100	300			
				75	110			

BIDANG PEMBANGUNAN : SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP
PRIORITAS BIDANG: Ketahanan Pangan dan Revitalisasi Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan

NO	FOKUS PRIORITAS /KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil Outcomes/Output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
v.	Peningkatan produksi ternak non ruminansia dengan pendayagunaan sumber daya lokal	Meningkatnya populasi dan produksi, serta meningkatnya pendayagunaan sumber daya lokal ternak non ruminansia	Pengembangan kelompok unggas lokal Pengembangan kelompok non unggas Pengembangan pakan ternak Pengembangan alsin ternak	230 28 25 50	470 72 70 45	Program Pencapaian Swasembada Daging Sapi Dan Peningkatan Penyediaan Pangan Hewani Yang Aman, Sehat, Utuh Dan Halal	Kementan	611,4
w.	Pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan menular strategis dan penyakit zoonosis	Penguatan kelembagaan kesehatan hewan Perlindungan hewan terhadap penyakit eksotik Terjaminnya mutu obat hewan	Penguatan otoritas veteriner melalui Puskeswan dan lab (unit) Terlaksananya vaksinasi dan pengobatan thd penyakit hewan (juta dosis) Terlaksananya pengambilan dan pemeriksaan sampel dlm rangka survailance PHMSZE (ribu sampel) Terlaksananya produksi dan pendaftaran dan pengawasan obat hewan yang beredar di Indonesia (produk/merek)	110 100 200 250	140 140 280 350	Program Pencapaian Swasembada Daging Sapi Dan Peningkatan Penyediaan Pangan Hewani Yang Aman, Sehat, Utuh Dan Halal	Kementan	1.148,2
x.	Perluasan areal pertanian	Meningkatnya luasan areal baru lahan pertanian dalam mendukung peningkatan produksi pertanian	Luasan (Ha) perluasan areal Tanaman pangan (sawah dan lahan kering), hortikultura, perkebunan Dan kawasan peternakan	32.505	2.000.000 ^{K)}	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Dan Sarana Pertanian	Kementan	13.085,8
y.	Pengelolaan air untuk pertanian	Meningkatnya ketersediaan air irigasi untuk pertanian	Tersedianya (unit) pengembangan sumber air alternatif skala kecil (melalui irigasi pedesaan, pengembangan sumber air tanah, pompanisasi air permukaan) yang berfungsi. Tersedianya optimasi pemanfaatan Air irigasi (melalui perbaikan JIUT/JIDES dan pengembangan TAM) yang berfungsi (ha)	1.005 108.486	7.085 2.000.000 ^{K)}	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Dan Sarana Pertanian	Kementan	3.649,7

BIDANG PEMBANGUNAN : SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP
PRIORITAS BIDANG: Ketahanan Pangan dan Revitalisasi Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan

NO	FOKUS PRIORITAS /KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil Outcomes/Output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
			Tersedianya (unit) pengembangan konservasi air (melalui pengembangan Embung, cek dam, sumur resapan, Antisipasi kekeringan dan banjir) yang berfungsi	464	18.799 ^{K)}			
z.	Pengembangan pengelolaan lahan pertanian	Meningkatnya produktivitas lahan pertanian, dan prasarana Jalan Usaha Tani/Jalan Produksi serta pengendalian lahan untuk mendukung peningkatan produksi pertanian	<p>Terlaksananya Lahan yang dioptimasi, dikonservasi, direhabilitasi dan direklamasi</p> <p>konservasi DAS Hulu 160.000 Ha (Adaptasi Iklim)</p> <p>Terbangunnya Rumha kompos 6.500 unit</p> <p>Terlaksananya Pengembangan <i>System of Rice Intensificaion</i> 2000 paket (adaptasi iklim)</p> <p>Tersedianya data bidang tanah petani yang disertifikasi 200.000 persil</p> <p>Tersedianya jalan sepanjang 12.500 km untuk JUT dan jalan produksi, serta tersedianya data bidang tanah petani yang layak disertifikasi</p>	<p>25.709</p> <p>9.600</p> <p>235</p> <p>62</p> <p>726</p> <p>952</p>	<p>74.648</p> <p>160.000^{K)}</p> <p>6.500^{K)}</p> <p>2.000^{K)}</p> <p>200.000^{K)}</p> <p>12.500^{K)}</p>	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Dan Sarana Pertanian	Kementan	2.979,7
aa.	Pengembangan penanganan pasca panen pertanian	Meningkatnya penanganan pasca panen hasil pertanian	Jumlah kelompok tani yang menerapkan penanganan pasca panen sesuai GHP dan standar mutu	1.800 poktan/ gapoktan	2.520 poktan gapoktan /	Program Peningkatan Nilai Tambah Daya Saing, Industri Hilir, Pemasaran Dan Ekspor Hasil Pertanian	Kementan	328,8

BIDANG PEMBANGUNAN : SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP
PRIORITAS BIDANG: Ketahanan Pangan dan Revitalisasi Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan

NO	FOKUS PRIORITAS /KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil Outcomes/Output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
bb.	Pengembangan ketersediaan dan penanganan rawan pangan	Meningkatnya pemantapan ketersediaan pangan dan penanganan rawan pangan	Jumlah Desa Mandiri Pangan yang dikembangkan. Jumlah Lumbung Pangan yang dikembangkan. Lokasi Rawan Pangan. Tersedianya Data dan Informasi tentang ketersediaan, cadangan dan daerah rawan pangan. Terlaksananya pemantauan dan pemantapan ketersediaan dan kerawanan pangan.	1.750 Desa 800 Lb 350 kab 33 Prop 33 Prop	5.000 Desa 2.500 Lb 450 kab 33 Prop 33 Prop	Program Peningkatan Diversifikasi Dan ketahanan Pangan Masyarakat	Kementan	982,6
cc.	Penelitian Dan Pengembangan Peternakan Dan Veteriner	Meningkatkan Inovasi Teknologi Peternakan dan Veteriner Mendukung Program Percepatan Produksi Swasembada Daging Sapi (P2SDS)	Jumlah rekomendasi pembangunan peternakan dan veteriner, diseminasi, promosi, publikasi hasil penelitian dan koordinasi dengan stakeholders	10	10	Program Penciptaan Teknologi Dan Varietas Unggul Berdaya Saing	Kementan	511,3

BIDANG PEMBANGUNAN : SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP
PRIORITAS BIDANG: Ketahanan Pangan dan Revitalisasi Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan

NO	FOKUS PRIORITAS /KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil Outcomes/Output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
			Jumlah SDG peternakan, TPT dan veteriner yang dikonservasi dan dikarakterisasi Jumlah galur baru ternak dan TPT yang dihasilkan Jumlah inovasi peternakan, TPT dan veteriner yang dihasilkan dan dialihkan/didesiminasikan kepada pengguna	112 6 22	112 8 25			
dd.	Penelitian/Analisis Sosial Ekonomi Dan kebijakan Pertanian	Hasil penelitian/ analisis sosial ekonomi dan rekomendasi kebijakan pertanian	Jumlah rekomendasi kebijakan tentang Penguatan daya saing dan perlindungan usaha pertanian; Pengelolaan sumber daya pertanian dan pembangunan infrastruktur pertanian; Pengembangan kelembagaan dan peraturan mendorong iklim usaha yang kondusif; Makro ekonomi mendorong pertumbuhan sektor pertanian; Pembangunan pertanian dan perdesaan	12	12	Program Penciptaan Teknologi Dan Varietas Unggul Berdaya Saing	Kementan	98,7
ee.	Penelitian dan pengembangan pascapanen pertanian	Meningkatnya inovasi teknologi pascapanen dan pengembangan produk hasil pertanian	Jumlah teknologi penanganan segar produk hortikultura Jumlah produk diversifikasi pangan dan substitusi pangan impor · Jumlah produk pengembangan/ product development untuk peningkatan nilai tambah	5 6 2	2 8 10	Program Penciptaan Teknologi Dan Varietas Unggul Berdaya Saing	Kementan	93,3

BIDANG PEMBANGUNAN : SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP

PRIORITAS BIDANG: Ketahanan Pangan dan Revitalisasi Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan

NO	FOKUS PRIORITAS /KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil Outcomes/Output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
ff.	Penelitian dan pengembangan tanaman pangan	Peningkatan inovasi teknologi tanaman pangan mendukung ketahanan dan kemandirian pangan	Jumlah varietas unggul baru padi, sereal, kacang-kacangan & umbi-umbian <ul style="list-style-type: none"> · Jumlah teknologi budidaya, panen dan pasca panen primer · Jumlah akses sumber daya genetik (SDG) padi, sereal, kacang-kacangan dan umbi-umbian terkoleksi, teridentifikasi dan terkonservasi untuk perbaikan sifat varietas · Jumlah produksi benih sumber (BS, FS) padi, sereal, kacang-kacangan dan umbi-umbian dengan SMM ISO 9001-2000 	5 - 6 5 800 BS 10 ton FS 20 ton	14 - 15 8 800 BS 15 ton FS 20 ton	Program Penciptaan Teknologi Dan Varietas Unggul Berdaya Saing	Kementan	657,3
gg.	Penelitian dan pengembangan tanaman perkebunan	Peningkatan inovasi tek. tan. perkebunan untuk meningkatkan produktivitas, diversifikasi dan nilai tambah tan. perkebunan	Jumlah varietas/klon unggul tanaman perkebunan Jumlah teknologi untuk peningkatan produktivitas tanaman perkebunan Jumlah produk olahan tanaman perkebunan	10 42 20	15 52 33	Program Penciptaan Teknologi Dan Varietas Unggul Berdaya Saing	Kementan	579,8

BIDANG PEMBANGUNAN : SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP
PRIORITAS BIDANG: Ketahanan Pangan dan Revitalisasi Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan

NO	FOKUS PRIORITAS /KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil Outcomes/Output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
hh.	Pengembangan perpustakaan dan penyebaran teknologi pertanian	Meningkatnya penyebaran teknologi hasil litbang pertanian mendukung ketahanan dan kemandirian	Jumlah judul jurnal primer dan publikasi bibliografis (judul)	13	13	Program Penciptaan Teknologi Dan Varietas Unggul Berdaya Saing	Kementan	78,1
			Jumlah perpustakaan yang dibina dan ditata (Uk/UPT)	65	65			
			Jumlah tambahan koleksi	30 jdl/3 dtbase	50 jdl/ 4 dtbase			
			Jumlah kegiatan diseminasi dan perpustakaan (keg)	8	8			
ii.	Penelitian/perekayasa dan pengembangan mekanisasi pertanian	Meningkatnya inovasi dan adopsi teknologi mekanisasi pertanian untuk peningkatan produktiifitas, efisiensi dan nilai tambah produk pertanian dan limbahnya	Inovasi teknologi dan sistem mekanisasi pertanian untuk peningkatan; produktivitas, efisiensi, kualitas, nilai tambah komoditas utama pertanian dan limbahnya	4	4	Program Penciptaan Teknologi Dan Varietas Unggul Berdaya Saing	Kementan	82,2
			Kerjasama litbang mektan serta bahan rekomendasi kebijakan (paket)	3	3			
			Prototipe alsin yang didiseminasikan (Paket)	1	1			

BIDANG PEMBANGUNAN : SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP
PRIORITAS BIDANG: Ketahanan Pangan dan Revitalisasi Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan

NO	FOKUS PRIORITAS /KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil Outcomes/Output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
jj.	Penelitian dan pengembangan bioteknologi dan sumber daya	Peningkatan inovasi dan adopsi hasil bioteknologi dan pemanfaatan sumberdaya genetik pertanian (SDGP)	<p>Jumlah aksesi SDGP dan database yang dikonservasi atau diremajakan</p> <p>Jumlah varietas atau galur harapan padi, kedelai, dan jagung berproduktivitas tinggi dan berumur genjah</p> <p>Jumlah galur harapan gandum tropis</p> <p>Jumlah galur padi dan jagung efisien penggunaan pupuk sintetik</p> <p>Jumlah biofertilizer untuk padi dan tebu</p>	<p>2250 aksesi; 4 dtbase</p> <p>51 galur kedelai dan padi; 3 populasi baru padi; 6 galur transgenik</p> <p>125 galur calon hibrida jagung unggul</p> <p>20 isolat potensial biofertilizer</p>	<p>2250 aksesi; 4 dtbase</p> <p>5 Galur transgenik (LUT)</p> <p>Galur gandum adaptif iklim LUT</p> <p>2-4 varietas unggul hibrida jagung Galur padi transgenik</p> <p>1 biofertilizer tebu</p>	Program Penciptaan Teknologi Dan Varietas Unggul Berdaya Saing	Kementan	173,1

BIDANG PEMBANGUNAN : SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP
PRIORITAS BIDANG: Ketahanan Pangan dan Revitalisasi Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan

NO	FOKUS PRIORITAS /KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil Outcomes/Output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
			Jumlah tanaman manggis dan durian tanpa biji	2 metode regenerasi dan transformasi	Bahan sambungan			
			Jumlah peta gen sifat-sifat penting pada kelapa sawit, jarak pagar dan sapi	7 sekuens whole genom	-			
kk.	Pengkajian dan Percepatan Diseminasi Inovasi Teknologi Pertanian	Pengembangan teknologi perta-nian serta pembinaan dan koordinasi kegiatan Balai Pengkajian Tekno-logi Pertanian	Jumlah koordinasi penyusunan penganggaran, pelaksanaan dan monev kegiatan di Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (koordinasi)	10	10	Program Penciptaan Teknologi Dan Varietas Unggul Berdaya Saing	Kementan	1.934,7
			Jumlah advokasi teknis dan kebijakan operasional pembangunan pertanian wilayah, regional, dan nasional (advokasi)	34	69			
			Jumlah adaptasi teknologi spesifik lokasi (teknologi)	64	96			
			Jumlah diseminasi inovasi pertanian (kegiatan)	329	446			

BIDANG PEMBANGUNAN : SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP
PRIORITAS BIDANG: Ketahanan Pangan dan Revitalisasi Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan

NO	FOKUS PRIORITAS /KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil Outcomes/Output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
II.	Penelitian dan Pengembangan hortikultura	Meningkatnya inovasi teknologi tan.hortikultura mendukung pengembangan kawasan hortikultura	Jml VUB yang diminati knsumen Jumlah PN yang terkonservasi dan terkarakterisasi Jml benih sumber : Sayuran VUB buah trop dan sub trop Aksesi mutasi buah trop Planlet, benih, stek tan hias Jumlah benih batas bawah dan batas atas hasil SE Jumlah teknologi prod hortikultura ramah lingkungan	40 20 Bw, 455 acc, 3925 20.000 GO 20 ton 14335 batang 960 151800 100.000 12	1032 600 acc 4100 28.000 GO 40 ton 18700 batang 960 254000 5.000.000 12	Program Penciptaan Teknologi Dan Varietas Unggul Berdaya Saing	Kementan	377,3

BIDANG PEMBANGUNAN : SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP
PRIORITAS BIDANG: Ketahanan Pangan dan Revitalisasi Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan

NO	FOKUS PRIORITAS /KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil Outcomes/Output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
mm.	Peningkatan kualitas Pelayanan karantina Pertanian dan Pengawasan keamanan Hayati.	Pelayanan karantina pertanian dan pengawasan keamanan hayati yang efektif	Vol. dan frek. operasional karantina pertanian dan pengawasan keamanan hayati (ribu - sertifikasi karantina) Tingkat kesesuaian tindakan karantina dan operasional pengawasan keamanan hayati terhadap kebijakan teknis operasional yang ditetapkan. Tingkat penurunan NNC (<i>Notification of Non Compliance</i>) Peningkatan Indeks kepuasan dan kepatuhan pengguna jasa	350 100% 50% 75%	450 100% 50% 90%	Program Peningkatan kualitas Pengkarantinaan Pertanian Dan Pengawasan keamanan Hayati	Kementan	1.476,4
nn.	Pelayanan perizinan dan investasi pertanian	Peningkatan penerimaan penyiapan bahan analisa, fasilitas proses teknis permohonan ijin, pendaftaran di bidang pupuk, pestisida dan alat mesin pertanian, benih/bibit, produk ternak dan pangan sgr serta penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi	Jumlah ijin usaha pertanian, ijin pemasukan/pengeluaran benih/bibit, obat hewan dan pakan ternak, produk ternak dan agensia hayati, serta rekomendasi produk pangan Bahan informasi dan bahan kebijakan pengembangan investasi pertanian (publikasi, pameran, bahan analisis untuk kebijakan pertanian) (paket)	2.500 1	5.000 1	Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Departemen Pertanian	Kementan	64,1

BIDANG PEMBANGUNAN : SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP
PRIORITAS BIDANG: Ketahanan Pangan dan Revitalisasi Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan

NO	FOKUS PRIORITAS /KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil Outcomes/Output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
oo.	Pengembangan perlindungan dan pendaftaran varietas tanaman	Meningkatnya kinerja pelayanan teknis perlindungan varietas tanaman	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Permohonan hak PVT - Jumlah pendaftaran varietas tanaman - Jumlah pelayanan Uji BUSS - Jumlah penerbitan sertifikat hak PVT - Jumlah penanaman varietas tanaman 	30 100 40 27 130	39 109 32 33 139	Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Departemen Pertanian	Kementan	38,7
pp.	Pengelolaan Sumber Daya Ikan (SDI)	Meningkatnya Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) yang terjamin ketersediaan sumber daya ikan dengan data dan pengelolaan pemanfaatan yang terintegrasi, akuntabel dan tepat waktu.	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah lokasi pemantauan dan evaluasi perlindungan dan pengkayaan SDI • Jumlah ekosistem PUD yang teridentifikasi (8 prov per tahun) • Jumlah peraian teritorial dan kepulauan yang teridentifikasi sumber dayanya • Jumlah ZEEI yang teridentifikasi sumber dayanya 	6 prov 8 prov 1 WPP 11 prov	33 prov 40 prov ^{ki} 11 WPP 33 prov 27 prov ^{ki}	Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap	KKP	354,6
qq.	Pembinaan dan Pengembangan Kapal Perikanan, Alat Penangkap Ikan, dan Pengawasan Kapal Perikanan	Terwujudnya kecukupan kapal perikanan Indonesia (yang laik laut, laik tangkap dan laik simpan), alat penangkap ikan (yang sesuai SNI) dan pengawasan yang memenuhi standar di setiap WPP	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah dan jenis kapal penangkap ikan yang memenuhi standar laik laut, laik tangkap dan laik simpan Jumlah alat penangkap ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang memenuhi standar 	500 unit 600 unit	700 unit 2.929 unit	Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap	KKP	384,0

BIDANG PEMBANGUNAN : SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP
PRIORITAS BIDANG: Ketahanan Pangan dan Revitalisasi Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan

NO	FOKUS PRIORITAS /KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil Outcomes/Output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
			Jumlah awak kapal perikanan yang memenuhi standar kompetensi	60 orang	240 orang			
rr.	Pengembangan Pembangunan dan Pengelolaan Pelabuhan Perikanan	Meningkatnya pembangunan dan pencapaian standar pelayanan prima di pelabuhan perikanan dengan fasilitas penunjang produksi, pengolahan, pemasaran dan kesyahbandaran yang sesuai standar.	Jumlah pelabuhan perikanan dengan fokus pembangunan di lingkaran luar dan daerah perbatasan yang potensial Jumlah penyiapan pembangunan pelabuhan perikanan sesuai dengan rencana induk Jumlah pelabuhan perikanan yang mempunyai Wilayah Kerja Operasional Pelabuhan Perikanan (WKOPP)	968 unit 35 Lokasi 10	988 unit 190 Lokasi ^{KD} 50	Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap	KKP	6.084,8
ss.	Pelayanan Usaha Perikanan Tangkap yang Efisien, Tertib, dan Berkelanjutan	Meningkatnya pelayanan prima dan ketertiban usaha perikanan tangkap sesuai ketersediaan SDI di setiap WPP secara akuntabel dan tepat waktu.	Jumlah keabsahan dan kelengkapan dokumen usaha perikanan tangkap Jumlah pelaku usaha perikanan tangkap yang memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan yang berlaku Jumlah kapal dan jenis alat penangkap ikan yang diperbolehkan sesuai dengan ketersediaan sumber daya ikan di setiap WPP	8.000 SIUP, SIPI/SIKPI 2.500 4.900 SIPI	12.000 SIUP, SIPI/SIKPI 4.500 8.900 SIPI	Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap	KKP	200,9

BIDANG PEMBANGUNAN : SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP
PRIORITAS BIDANG: Ketahanan Pangan dan Revitalisasi Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan

NO	FOKUS PRIORITAS /KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil Outcomes/Output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
tt.	Pengembangan Usaha Penangkapan Ikan dan Pemberdayaan Nelayan Skala Kecil	Jumlah kawasan potensi perikanan tangkap yang menjadi kawasan Minapolitan dengan usaha yang bankable serta realisasi investasi usaha perikanan tangkap.	Jumlah kawasan minapolitan potensi perikanan tangkap yang memiliki Kelompok Usaha Bersama (KUB) yang Mandiri. Jumlah Kelompok Usaha Bersama (KUB) yang Mandiri. Jumlah usaha perikanan tangkap yang memenuhi kelayakan usaha dan <i>bankable</i>	1 PP 5 PPI 999 KUB 999 KUB	1 PP 5 PPI 1.800 KUB 1.800 KUB	Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap	KKP	454,1
uu.	Pengembangan Sistem Produksi Pembudidayaan Ikan	Meningkatnya produksi perikanan budidaya dengan mutu terjamin dan data akurat.	Jumlah produksi perikanan budidaya air tawar. Jumlah produksi perikanan budidaya air payau. Jumlah produksi perikanan budidaya laut Jumlah usaha perikanan budidaya yang bersertifikat dan memenuhi standar.	1,4 juta ton 1.137.920 ton 2.846.475 ton 1.000 unit	4,6 juta ton 2.022.220 ton 10.288.175 ton 7.000 unit	Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	KKP	620,8
vv.	Pengembangan Sistem Perbenihan Ikan	Terpenuhinya kebutuhan benih untuk produksi dan pasar dengan mutu terjamin dan data akurat.	Jumlah produksi induk unggul. Jumlah unit perbenihan yang bersertifikat dan benih yang memenuhi standar	6,5 juta ekor induk 267.280 ton (2.784 unit kebun bibit) 51 unit	52,2 juta ekor ^{ko} induk 2,7 juta ton ^{ko} 404 unit ^{ko}	Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	KKP	534,3

BIDANG PEMBANGUNAN : SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP
PRIORITAS BIDANG: Ketahanan Pangan dan Revitalisasi Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan

NO	FOKUS PRIORITAS /KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil Outcomes/Output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
ww.	Pengembangan Sistem kesehatan Ikan dan Lingkungan Pembudidayaan Ikan kawasan perikanan budidaya yang sehat serta produk perikanan yang aman dikonsumsi.	kawasan perikanan budidaya yang sehat serta produk perikanan yang aman dikonsumsi.	Jumlah laboratorium uji yang memenuhi standar teknis. Jumlah kawasan perikanan budidaya yang sehat serta persentasi jenis biota perairan yang dikonservasi.	Lab. kualitas air : 25 unit Lab. HPI (hama penyakit ikan) : 20 unit Lab. Residu : 9 unit 350 kab	Lab. Kualitas air : 48 unit Lab. HPI : 35 unit Lab. Residu : 25unit 450 kab	Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	KKP	678,3

BIDANG PEMBANGUNAN : SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP
PRIORITAS BIDANG: Ketahanan Pangan dan Revitalisasi Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan

NO	FOKUS PRIORITAS /KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil Outcomes/Output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
xx.	Pengembangan Sistem Usaha Pembudidayaan Ikan	kawasan potensi perikanan budidaya menjadi kawasan Minapolitan dengan usaha yang bankable.	Jumlah kelompok usaha perikanan budidaya yang memenuhi standar kelembagaan dan jumlah tenaga kerja yang memiliki kompetensi. Jumlah usaha perikanan budidaya yang memperoleh SNI serta jumlah lembaga sertifikasi yang terakreditasi	157 kelompok 394 orang 936 unit usaha 19 Lab uji 3 LSSM (lembaga sertifikat sistem mutu)	3.388 kelompok 2.364 orang 4.948 unit usaha 43 Lab uji 15 LSSM	Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	KKP	466,4
yy.	Pengembangan Sistem Prasarana dan Sarana Pembudidayaan Ikan	kawasan perikanan budidaya yang memiliki prasarana dan sarana sesuai kebutuhan.	Luas lahan budidaya sesuai target produksi disertai data potensi yang akurat.	1.115.666 Ha, 70 potensi kawasan	1.365.416 Ha, 150 potensi kawasan	Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	KKP	667,5
zz.	Pengawasan dan Penerapan Teknologi Terapan Adaptif Perikanan Budidaya	Sentra produksi perikanan budidaya yang memiliki komoditas unggulan dan menerapkan teknologi inovatif.	Persentase unit usaha yang mendapatkan pelayanan sertifikasi sesuai standar dengan informasi yang akurat.	100%	100%	Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	KKP	1.109,5
aaa.	Penelitian dan Pengembangan IPTEK Perikanan Tangkap	Wilayah perairan Indonesia yang teridentifikasi potensi produksi, karakteristik, kebutuhan konservasi SDInya serta jumlah inovasi teknologi dan rekomendasi pengelolaannya.	Jumlah rekomendasi pengelolaan	6 buah	23 buah ^{ko}	Program Penelitian dan Pengembangan IPTEK kelautan dan Perikanan	KKP	413,0

BIDANG PEMBANGUNAN : SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP
PRIORITAS BIDANG: Ketahanan Pangan dan Revitalisasi Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan

NO	FOKUS PRIORITAS /KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil Outcomes/Output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
bbb.	Penelitian dan Pengembangan IPTEK Perikanan Budidaya	HKI (Hak kekayaan Intelektual), rekomendasi, inovasi teknologi dan produk biologi yang meningkatkan efisiensi produksi, ragam, kualitas dan keamanan komoditas unggulan.	Jumlah rekomendasi yang meningkatkan efisiensi produksi, ragam varietas baru/unggul, kualitas dan keamanan komoditas unggulan	5	25 ^{ko}	Program Penelitian dan Pengembangan IPTEK kelautan dan Perikanan	KKP	434,4
ccc	Peningkatan Pengelolaan Hutan Tanaman	Peningkatan produksi hutan tanaman	Penambahan areal ijin usaha pemanfaatan hutan tanaman (HTI/HTR) seluas 3 juta ha Penambahan areal tanaman pada hutan tanaman (HTI/HTR) seluas 2,65 juta ha. Sertifikasi Pengelolaan Hutan Produksi Lestari pada 50 unit manajemen hutan tanaman Terbangunnya Silvo Pastura seluas 50.000 ha	450.000 ha 450.000 ha 5 unit 10.000 ha	3.000.000 ha 2.650.000 ha 50 unit 50.000 ha	Peningkatan Pemanfaatan Hutan Produksi	Kemenuh	249,5

BIDANG PEMBANGUNAN : SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP
PRIORITAS BIDANG: Ketahanan Pangan dan Revitalisasi Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan

NO	FOKUS PRIORITAS /KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil Outcomes/Output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
ddd	Peningkatan Pengelolaan Hutan Alam Produksi	Peningkatan produksi hutan alam	Produksi hasil hutan kayu/bukan kayu/jasa lingkungan sebesar 5 % Unit IUPHHk bersertifikat PHPL meningkat 50 % 50% produksi penebangan bersertifikat Legalitas kayu Pengelolaan LOA oleh IUPH-RE seluas 2,5 juta Ha	1% 10% 10% 300.000 ha	5% 50% 50% 2.500.000 ha	Peningkatan Pemanfaatan Hutan Produksi	Kemenhut	275,7
eee.	Peningkatan perencanaan pengelolaan hutan produksi	areal hutan produksi tertata baik dalam kesatuan pengelolaan hutan produksi (KPHP) maupun unit-unit usaha pemanfaatan hutan produksi	Terbentuknya KPHP pada seluruh kawasan hutan produksi Tersedianya areal calon/usulan pemanfaatan hutan produksi dalam bentuk unit-unit usaha pada 26 provinsi.	20% 20%	100% 100%	Peningkatan Pemanfaatan Hutan Produksi	Kemenhut	100,5
fff	Peningkatan usaha industri primer kehutanan	Peningkatan ekspor industri hasil hutan	Pemenuhan bahan baku dari hutan tanaman dan limbah meningkat 75% Produk industri hasil hutan yang bersertifikat legalitas kayu meningkat 50% Efisiensi penggunaan bahan baku industri meningkat sebesar 10% (rata-rata 2% per tahun)	15% 10% 2%	75% 50% 10%	Peningkatan Pemanfaatan Hutan Produksi	Kemenhut	121,7

BIDANG PEMBANGUNAN : SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP
PRIORITAS BIDANG: Ketahanan Pangan dan Revitalisasi Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan

NO	FOKUS PRIORITAS /KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil Outcomes/Output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
ggg.	Pengembangan Perhutanan Sosial	Meningkatnya pengelolaan hutan melalui pemberdayaan masyarakat	Fasilitasi penetapan areal kerja pengelolaan hutan kemasyarakatan (Hkm) seluas 2 juta ha Fasilitasi 500 kelompok/unit ijin usaha pengelolaan Hkm Fasilitasi 50 unit kemitraan usaha Hkm Fasilitasi dukungan kelembagaan ketahanan pangan di 32 provinsi Fasilitasi pembangunan hutan rakyat kemitraan untuk bahan baku kayu industri pertukangan seluas 250.000 Ha Fasilitasi pembentukan dan berfungsinya sentra HHBK Unggulan di 30 kabupaten Areal kerja hutan desa seluas 500.000 ha	400.000 Ha 100 klpk 10 Unit 4 Prov 50.000 Ha 6 kab 100.000 Ha	2.000.000 Ha 500 klpk 50 Unit 32 Prov 250.000 Ha 30 kab 500.000 Ha	Peningkatan Fungsi dan Daya Dukung DAS berbasis Pemberdayaan Masyarakat	Kemenuh	6.239,2
2.	PENINGKATAN EFISIENSI SISTEM DISTRIBUSI DAN STABILISASI HARGA PANGAN	Membatkannya distribusi bahan pangan antar wilayah Terkendalnya harga pangan pokok pada tingkat yang terjangkau masyarakat luas	Nilai fluktuasi harga pangan; Perbedaan harga bahan pangan antar wilayah; Perbedaan harga bahan pangan antar waktu; Jumlah dan persentase peningkatan cadangan beras pemerintah.					1.185,6

BIDANG PEMBANGUNAN : SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP
PRIORITAS BIDANG: Ketahanan Pangan dan Revitalisasi Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan

NO	FOKUS PRIORITAS /KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil Outcomes/Output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
a.	Pengembangan pemasaran domestik	Meningkatnya pemasaran hasil pertanian	Jumlah kelembagaan pemasaran bagi petani (pasar) Jumlah hasil pertanian yang diserap pasar dalam negeri	186 0%	223 5%	Program Peningkatan Nilai Tambah Daya Saing, Industri Hilir, Pemasaran Dan Ekspor Hasil	Kementan	386,9
b.	Pengembangan Sistem Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan.	Meningkatnya pemantapan distribusi dan harga pangan.	Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM) (Gap) Tersedianya data dan informasi tentang distribusi, harga dan akses pangan. (prop) Terlaksananya pemantauan dan pemantapan distribusi, harga dan akses pangan.	750 33 33	2.000 33 33	Program Peningkatan Diversifikasi Dan ketahanan Pangan Masyarakat	Kementan	798,7
3.	PENINGKATAN PEMENUHAN KEBUTUHAN KONSUMSI PANGAN	· Meningkatnya kecenderungan dan kualitas konsumsi pangan masyarakat · Meningkatnya keragaman konsumsi pangan	· Persentase penurunan dan jumlah penduduk rawan pangan; · Persentase dan jumlah wilayah rawan pangan; · Tingkat konsumsi energi dan protein; · Nilai/skor Pola Pangan Harapan (PPH); · Persentase dan jumlah unit pengolahan pangan yang berbasis sumberdaya pangan lokal;					2.526,7

BIDANG PEMBANGUNAN : SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP
PRIORITAS BIDANG: Ketahanan Pangan dan Revitalisasi Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan

NO	FOKUS PRIORITAS /KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil Outcomes/Output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
a.	Penjaminan pangan asal hewan yang aman dan halal serta pemenuhan persyaratan produk hewan non pangan	Penguatan peran dan fungsi lembaga otoritas veteriner	Jumlah kebijaka kesmavet (pedoman)	25	31	Program Pencapaian Swasembada Daging Sapi Dan Peningkatan Penyediaan Pangan Hewani Yang Aman, Sehat, Utuh Dan Halal	Kementan	1.059,7
		Peningkatan jaminan produk hewan ASUH dan daya saing produk hewan	Pertumbuhan terpenuhinya persyaratan dan standar keamanan dan mutu produk hewan pangan dan non pangan (RPU,RPH,RPB,TPU,KIOS DAGING,TPS) Unit	169	400			
		Tersosialisasikannya resiko residu dan cemaran pada produk hewan serta zoonosis kepada masyarakat dan tersedianya profil keamanan produk hewan nasional serta peta zoonosis	Jumlah lab yang dibina (unit)	35	41			
b.	Peningkatan Sistem karantina Tumbuhan	kebijakan teknis karantina Tumbuhan yang efektif dalam operasional pencegahan masuk dan menyebarnya OPTK	- Jml Rumusan kebijakan teknis operasional karantina tumbuhan yang dihasilkan/disempurnakan dan dapat berimplementasi (paket)	3	3	Program Peningkatan kualitas Pengkarantinaan Pertanian Dan Pengawasan keamanan Hayati	Kementan	39,5

BIDANG PEMBANGUNAN : SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP
PRIORITAS BIDANG: Ketahanan Pangan dan Revitalisasi Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan

NO	FOKUS PRIORITAS /KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil Outcomes/Output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
c.	Peningkatan Sistem karantina Hewan	kebijakan teknis karantina Hewan yang efektif dalam operasional pencegahan masuk, menyebar dan keluarnya HPHK.	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah Rumusan kebijakan teknis operasional karantina hewan yang dihasilkan/disempurnakan dan dapat berimplementasi (paket) 	3	3	Program Peningkatan kualitas Pengkarantinaan Pertanian Dan Pengawasan keamanan Hayati	Kementan	39,5
d.	Pengembangan penganekaragaman konsumsi pangan dan peningkatan keamanan pangan segar	Meningkatnya pemantapan penganekaragaman konsumsi pangan dan keamanan pangan	<ul style="list-style-type: none"> Desa P2KP (Percepatan penganekaragaman konsumsi pangan. (desa) Promosi penganekaragaman konsumsi pangan dan keamanan pangan Penanganan keamanan pangan tingkat produsen dan konsumen Terlaksananya pemantauan dan pemantapan penganekaragaman konsumsi pangan dan keamanan pangan (prov) Tersedianya data dan informasi tentang pola konsumsi, penganekaragaman dan keamanan pangan (prov) Tersedianya data dan informasi tentang pola konsumsi, penganekaragaman dan keamanan pangan segar (prov) 	2.000 383 Pusat/ Prov/kab 33 Prop	10.000 484 Pusat/ Prov/kab 429 kab	Program Peningkatan Diversifikasi Dan ketahanan Pangan Masyarakat	Kementan	994,3
				33	33			
				33	33			
				33	33			

BIDANG PEMBANGUNAN : SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP
PRIORITAS BIDANG: Ketahanan Pangan dan Revitalisasi Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan

NO	FOKUS PRIORITAS /KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil Outcomes/Output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
e.	Fasilitasi Pengembangan Jaminan Mutu dan keamanan Hasil Perikanan	Meningkatnya unit penanganan, pengolahan dan distribusi hasil perikanan yang memperoleh sertifikasi sesuai standar nasional dan internasional	Jumlah laboratorium sertifikasi yang memiliki sarana prasarana sesuai standar mutu laboratorium Jumlah kegiatan penanganan, pengolahan, distribusi dan pengujian mutu hasil perikanan yang memperoleh SNI dan persyaratan internasional	17 lab 179 SNI	40 lab ^{ki)} 1.095 SNI ^{ki)}	Program Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan	KKP	233,8
f.	Fasilitasi Penguatan dan Pengembangan Pemasaran Dalam Negeri Hasil Perikanan	Meningkatnya jumlah desa yang memiliki pasar yang mampu memfasilitasi penjualan hasil perikanan dan tingkat konsumsi ikan	Jumlah pelelangan ikan dan pasar ikan yang berfungsi sesuai standar Jumlah lokasi pelaksanaan kegiatan Gemarikan (Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan)	18 TPI 7.061 pasar 33 provinsi	271 TPI ^{ki)} 35 ribu pasar ^{ki)} 33 provinsi	Program Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan	KKP	590,9

BIDANG PEMBANGUNAN : SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP
PRIORITAS BIDANG: Ketahanan Pangan dan Revitalisasi Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan

NO	FOKUS PRIORITAS /KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil Outcomes/Output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
g	Pengembangan dan Pembinaan Perkarantina Ikan	Pengembangan dan Pembinaan Perkarantina Ikan	Persentase media pembawa hama penyakit ikan impor, ekspor dan antar area yang bebas hama penyakit ikan karantina dengan laboratorium karantina yang sesuai standar OIE dan SNI	63.34%	83.34%	Program Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KKP	KKP	1.702,0
4.	PENINGKATAN NILAI TAMBAH, DAYA SAING, DAN PEMASARAN PRODUK PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN	Meningkatnya ekspor hasil –hasil pertanian, perikanan dan kehutanan Berkembangnya usaha pengolahan hasil pertanian, perikanan dan kehutanan	Laju pertumbuhan ekspor hasil pertanian, perikanan dan kehutanan Jumlah usaha pengolahan hasil pertanian, perikanan dan kehutanan yang bernilai tambah dan berdaya saing					1.178,0
a.	Pengembangan mutu dan standarisasi pertanian	Meningkatnya mutu dan keamanan pangan hasil pertanian	Jumlah usaha pasca panen dan pengolahan yang menerapkan sistem jaminan mutu. Jumlah pengujian mutu alat mesin pertanian	330 unit + 54 unit organik 42 sertifikat	330 unit + 54 unit organik 42 sertifikat	Program Peningkatan Nilai Tambah Daya Saing, Industri Hilir, Pemasaran Dan Ekspor Hasil Pertanian	Kementan	303,0
b.	Pengembangan pengolahan hasil pertanian	Berkembangnya pengolahan hasil pertanian yang berkelanjutan	Jumlah usaha pengolahan hasil pertanian yang bernilai tambah dan berdaya saing (unit)	11200	4000	Program Peningkatan Nilai Tambah Daya Saing, Industri Hilir, Pemasaran Dan Ekspor Hasil Pertanian	Kementan	777,5
c.	Pengembangan pemasaran internasional	Meningkatnya pemasaran internasional hasil pertanian	Jumlah ekspor dan surplus neraca perdagangan hasil pertanian	Meningkat 15% dan meningkat 30%	Meningkat 15% dan meningkat 30%	Program Peningkatan Nilai Tambah Daya Saing, Industri Hilir, Pemasaran Dan Ekspor Hasil Pertanian	Kementan	278,5

BIDANG PEMBANGUNAN : SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP
PRIORITAS BIDANG: Ketahanan Pangan dan Revitalisasi Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan

NO	FOKUS PRIORITAS /KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil Outcomes/Output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
d.	Pengembangan Sistem Informasi dan Peningkatan sistem Pengawasan keamanan Hayati	kebijakan teknis pengawasan keamanan hayati yang efektif dalam operasional pengawasan keamanan hayati hewani dan Nabati; dan sistem informasi yang optimal dalam mendukung operasional Program Barantan	Jml Rumusan kebijakan teknis operasional pengawasan keamanan hayati yang dihasilkan/disempurnakan dan dapat berimplementasi Tingkat kesiapan infrastruktur sistem informasi Barantan Prosentase peningkatan akses informasi melalui jaringan ke pusat data Barantan oleh instansi terkait, pengguna jasa dan unit kerja lingkup Barantan	2	2	Program Peningkatan kualitas Pengkantinanaan Pertanian Dan Pengawasan keamanan Hayati	Kementan	70,0
e.	Peningkatan kualitas Penyelenggaraan laboratorium Uji Standar karantina Pertanian	Penyelenggaraan laboratorium yang berkualitas dalam mendukung efektifitas penilaian dan pengendalian resiko ditempat pemasukkan dan pengeluaran	Jumlah teknik dan metoda tindakan karantina dan pengawasan keamanan hayati yang diujicobakan dan dikembangkan Jumlah sampel lab. yang diperiksa sesuai ruang lingkup pengujian (Uji Standar, rujukan, konfirmasi dan profisiensi) Jumlah laboratorium karantina yang diakreditasi	4	5	Program Peningkatan kualitas Pengkantinanaan Pertanian Dan Pengawasan keamanan Hayati	Kementan	99,3
f	Fasilitasi Pengembangan Industri Pengolahan Hasil Perikanan	Meningkatnya volume produk olahan hasil perikanan dengan kemasan dan mutu terjamin	Jumlah sarana prasarana pengolahan sesuai target produksi pengolahan 1. Jumlah sentra pengolahan 2. Volume produksi dari UKM	58 lokasi 5 lokasi 2,3 juta ton	84 lokasi 25 lokasi ^{K)} 2,8 juta ton	Program Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan	KKP	245,5

BIDANG PEMBANGUNAN : SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP
PRIORITAS BIDANG: Ketahanan Pangan dan Revitalisasi Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan

NO	FOKUS PRIORITAS /KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil Outcomes/Output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
h	Fasilitasi Penguatan dan Pengembangan Pemasaran Luar Negeri Hasil Perikanan	Meningkatnya jumlah pangsa pasar ekspor perikanan	Jumlah penambahan negara tujuan ekspor Jumlah UKM binaan yang berpotensi ekspor	3 50	5 50	Program Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan	KKP	94,1
i	Fasilitasi Pembinaan dan Pengembangan Sistem Usaha dan Investasi Perikanan	Meningkatnya jumlah nilai investasi (PMA dan PMDN) bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan dan jumlah unit pengolahan ikan yang memenuhi standar ketenagakerjaan	Jumlah unit usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan yang memenuhi standar ketenagakerjaan sesuai SKKNI	430 UPI		Program Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan	KKP	244,9
j.	Peningkatan tertib peredaran hasil hutan dan iuran hasil hutan	Penatausahaan hasil hutan dan iuran kehutanan berjalan tertib sesuai ketentuan	· PNBP dari pemanfaatan hutan produksi meningkat sebesar 10% · Implementasi SIM PUHH secara online di seluruh unit management IUPHHK dan IPHHK	2% 20%	10% 100%	Peningkatan Pemanfaatan Hutan Produksi	Kemenhut	325,5
k.	Penelitian dan Pengembangan Hasil Hutan	ketersediaan dan termanfaatkannya IPTEK dasar dan terapan bidang pengolahan hasil hutan	§ Iptek dasar dan terapan yang dihasilkan pada bidang pengolahan hasil hutan sebanyak 5 judul § Iptek dasar dan terapan yang dimanfaatkan oleh pengguna bidang pengolahan hasil hutan sebanyak 5 judul	20% 20%	100% 100%	Penelitian dan Pengembangan Departemen Kehutanan	Kemenhut	109,7
l.	Penelitian dan Pengembangan Peningkatan Produktivitas Hutan	ketersediaan dan pemanfaatan IPTEK dasar dan terapan hutan tanaman	§ Iptek dasar dan terapan bidang hutan tanaman dan hasil hutan bukan kayu (HHBK) sebanyak 6 judul § Iptek dasar dan terapan yang dimanfaatkan oleh pengguna bidang hutan tanaman dan HHBK sebanyak 6 judul	20% 20%	100% 100%	Penelitian dan Pengembangan Departemen Kehutanan	Kemenhut	158,2

BIDANG PEMBANGUNAN : SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP
PRIORITAS BIDANG: Ketahanan Pangan dan Revitalisasi Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan

NO	FOKUS PRIORITAS /KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil Outcomes/Output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
5.	PENINGKATAN KAPASITAS MASYARAKAT PERTANIAN, PERIKANAN, DAN KEHUTANAN	Meningkatnya kemampuan dan mutu layanan penyuluhan bagi petani, petani hutan, nelayan dan pembudidaya ikan	· jumlah kelembagaan dan tenaga penyuluh pertanian, perikanan, dan kehutanan					2.926,4
a	Pemantapan sistem pelatihan pertanian	Menumbuh kembangkan kelembagaan pelatihan dan kelembagaan petani Meningkatkan kualitas dan kuantitas ketenagaan pelatihan pertanian Mengembangkan pelatihan aparatur pertanian Mengembangkan pelatihan non aparatur pertanian Meningkatkan penyelenggaraan pelatihan pertanian Mengembangkan kerjasama pelatihan pertanian	jumlah kelembagaan UPT Pusat dan P4S yang terakreditasi Jumlah aparatur pertanian yang ditingkatkan kompetensinya melalui pelatihan (orang) Jumlah non aparatur pertanian yang ditingkatkan kompetensinya melalui pelatihan (orang) Persentase jumlah kegiatan yang mendukung penyelenggaraan pelatihan pertanian yang dirancang dan dianggarkan (%) Jumlah kegiatan kerjasama pelatihan dan prosentase jumlah jenis pelatihan yang dirancang dan dilaksanakan (paket)	40 17.010 14.491 60 15	880 27.983 24.678 90 15	Program Pengembangan Sdm Pertanian Dan kelembagaan Petani	Kementan	968,1

BIDANG PEMBANGUNAN : SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP
PRIORITAS BIDANG: Ketahanan Pangan dan Revitalisasi Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan

NO	FOKUS PRIORITAS /KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil Outcomes/Output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
b	Pemantapan sistem penyuluhan pertanian	Menata dan menguatkan kelembagaan penyuluhan pertanian Menumbuhkembangkan kelembagaan petani Meningkatnya BPP model Meningkatkan kualitas dan kuantitas ketenagaan penyuluh pertanian Meningkatkan mutu penyelenggaraan penyuluhan pertanian	Jumlah kelembagaan penyuluhan pertanian yang terbentuk sesuai UU No. 16 Tahun 2006 tentang SP3k(Bakorluh dan Bapeluh) Jumlah kelembagaan petani (gapoktan) Jumlah BPP model Jumlah ketenagaan penyuluhan pertanian yang ditingkatkan kualitas dan kuantitasnya(orang) Persentase jumlah kegiatan yang mendukung penyelenggaraan penyuluhan pertanian yang dirancang dan dianggarkan (%)	245 28.304 336 27.393 30	491 72.000 458 72.000 100	Program Pengembangan Sdm Pertanian Dan kelembagaan Petani	Kementan	4.202,4
c	Pelayanan pembiayaan Pertanian, Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) dan Penguatan kelembagaan Ekonomi Perdesaan Melalui LM3	Peningkatan realisasi penyaluran kredit program (KKP-E dan KUR) pembiayaan komersial, pembiayaan syariah, pengembangan sentra usaha pertanian perdesaan, dan pengembangan Gapoktan PUAP	Realisasi penyaluran kredit program untuk pertanian (KKP-E, KUR) Realisasi penyaluran pembiayaan Syariah dan pembiayaan komersial untuk sektor pertanian Jumlah sentra-sentra usaha pertanian di perdesaan Jumlah Gapoktan PUAP (unit)	1,5 trilyun 4 trilyun 200 10.000	2,5 trilyun 8 trilyun 200 10.000	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Departemen Pertanian	Kementan	5.621,6
d.	Pelatihan kelautan dan Perikanan	Terselenggaranya pelatihan yang sesuai standar serta persentase lulusan yang meningkat kinerjanya sesuai standar kompetensi dan kebutuhan pasar	Jumlah lulusan pelatihan yang sesuai standar serta jumlah lulusan yang meningkat kinerjanya sesuai standar kompetensi dan kebutuhan pasar	6.160 masyarakat 1.103 aparatur	15.000 masyarakat 2200 aparatur	Program Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan	KKP	347,6

BIDANG PEMBANGUNAN : SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP
PRIORITAS BIDANG: Ketahanan Pangan dan Revitalisasi Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan

NO	FOKUS PRIORITAS /KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil Outcomes/Output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
e	Penyuluhan kelautan dan Perikanan	Meningkatnya kawasan potensi perikanan yang memiliki kelompok pelaku utama yang mandiri dalam mengembangkan usaha perikanan	Jumlah kelompok potensi perikanan yang disuluh	300 kelompok di 50 kawasan	700 kelompok di 50 kawasan	Program Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan	KKP	447,1
f.	Pendidikan kelautan dan Perikanan	Terpenuhinya tenaga terdidik kompeten sesuai standar dan kebutuhan serta prioritas nasional	Jumlah lulusan pendidikan yang kompeten sesuai standar dan kebutuhan serta prioritas nasional	1.400 orang	7000 orang ^{K)}	Program Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan	KKP	963,4
g	Penyuluhan kehutanan	Peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan kehutanan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat	Pembentukan 500 kelompok masyarakat produktif mandiri Peningkatan kapasitas 4.500 orang penyuluh kehutanan Kampanye Indonesia Menanam (KMI) pada 33 provinsi Kemitraan/jejaring kerja penyuluhan kehutanan sebanyak 5 paket	100 klpk 900 Org 33 Prov 1 Paket	500 klpk 4.500 Org 33 Prov 5 Paket	Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya Departemen Kehutanan	Kemenhut	407,2
h	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Departemen Kehutanan dan SDM kehutanan Lainnya	Meningkatnya kualitas dan kapasitas SDM Deparatemen kehutanan serta SDM kehutanan lainnya (Pemda dan Masyarakat)	Penyelenggaraan SMK kehutanan 1440 siswa Diklat teknis dan administrasi 15.000 orang peserta karyasiswa lulus studi S2/S3 sebanyak 325 orang siswa Sertifikat ISO 9001 : 2007 Sekolah Menengah kejuruan (SMK) kehutanan sebanyak 5 unit	285 siswa 3.000 orang 65 siswa 0 unit	1.440 siswa 15.000 orang 325 siswa 5 unit	Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya Departemen Kehutanan	Kemenhut	761,2
TOTAL								49.470,3

Keterangan :

^{K)} Angka Kumulatif 5 tahun (2010-2014)

PRIORITAS BIDANG: Ketahanan dan Kemandirian Energi

NO	FOKUS PRIORITAS /KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil Outcomes/Output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN / LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
1	Peningkatan produksi dan cadangan migas (intensification)							2.350,26
a.	Penyiapan Kebijakan Dan Peningkatan Kerja Sama Bilateral Dan Multilateral Dalam Rangka Optimalisasi Penerimaan Negara Dan Peningkatan Investasi Kegiatan Usaha Migas Serta Pemberdayaan Kapasitas Nasional	Pengembangan program, peningkatan penerimaan negara, investasi, kerjasama, dan kapasitas nasional bidang migas	Jumlah kejadian kelangkaan pasokan BBM dan LPG	3	12 ^{K)}	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENYEDIAAN MINYAK DAN GAS BUMI	KESDM	2,76
			Jumlah laporan monitoring dan pengawasan pendistribusian BBM dan LPG	1 lap	5 lap ^{K)}			-
			Persentase terpenuhinya kebutuhan bahan baku pupuk dan petrokimia dalam negeri	100%	100%			9,00

PRIORITAS BIDANG: Ketahanan dan Kemandirian Energi

NO	FOKUS PRIORITAS /KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil Outcomes/Output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN / LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
			Peningkatan kapasitas infrastruktur	4	4			15,42
			Roadmap rasionalisasi subsidi BBM					1,00
			Jaminan pasokan gas untuk industri, transportasi, pembangkit listrik	70%	70%			5,53
			Jumlah realisasi Investasi subsektor migas (Juta US\$)	15.415	19.188			40,46
			Transparansi dan akuntabilitas pencatatan pendapatan negara	100%	100%			75,25
			Ratio tenaga kerja asing dengan tenaga kerja nasional	1	1			13,89
			Persentase pemanfaatan barang dan jasa dalam negeri pada usaha minyak dan gas bumi	55	295 ^{K)}			16,09

PRIORITAS BIDANG: Ketahanan dan Kemandirian Energi

NO	FOKUS PRIORITAS /KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil Outcomes/Output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN / LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
b.	Pembinaan dan Penyelenggaraan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi	Meningkatnya pengelolaan, perusahaan dan pembinaan usaha hulu minyak dan gas bumi dan CBM	Jumlah Kontrak Kerja Sama Minyak dan gas Bumi dan CBM yang ditawarkan dan ditandatangani	40 KKS Migas dan 10 KKS GMB ditawarkan	40 KKKS Migas dan 10 KKS GMB ditawarkan	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENYEDIAAN MINYAK DAN GAS BUMI	KESDM	117,38
			Jumlah produksi migas dan CBM					57,97
			- Minyak Bumi (MBOPD)	965	1.200 (*)			-
			- Gas Bumi (MBOEPD)	1.593	1.633			-
			- CBM (MBOEPD)	-	113,12			-
			Jumlah investasi sub sektor minyak dan gas bumi dan CBM	554 Juta USD dan 150 Juta USD dari komitmen 3 tahun pertama	665 Juta USD dan 180 Juta USD dari komitmen 3 tahun pertama			7,27

PRIORITAS BIDANG: Ketahanan dan Kemandirian Energi

NO	FOKUS PRIORITAS /KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil Outcomes/Output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN / LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
			Jumlah kegiatan eksplorasi dalam upaya mencari cadangan migas baru	Survei Seismik 2D 14.700 km, Survei Seismik 3D 7.975 km ² , Pemboran 63 sumur	Survei Seismik 2D 2.000 km, Survei Seismik 3D 1.000 km ² , Pemboran 45 sumur			59,94
			Jumlah pelaksanaan Survei Umum di Wilayah Terbuka	Data seismik 2D dan hasil pengolahannya di Lepas Pantai Sulawesi Selatan sepanjang 2000 km	Data seismik 2D dan hasil pengolahannya di Lepas Pantai Indonesia Barat sepanjang 2000 km			213,68
			Jumlah kegiatan penyiapan, promosi dan penawaran Wilayah Kerja Baru Migas	8 (delapan) event	50 ^{K)}			28,66
			Menyiapkan Rencana Induk Petrokimia (DME)	1,8% dari produksi nasional	2% produksi nasional			2,21

PRIORITAS BIDANG: Ketahanan dan Kemandirian Energi

NO	FOKUS PRIORITAS /KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil Outcomes/Output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN / LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
			Prosentasi pemanfaatan gas bumi untuk kebutuhan dalam negeri.	50%	67%			6,24
			Potensi Cadangan Minyak dan Gas Bumi dan CBM					3,50
			Jumlah laporan evaluasi cadangan migas dan CBM	1 lap	4 lap ^{K)}			-
			a. Potensi Cadangan Minyak (MMSTB)	8.363,19	8.651,18			-
			b. Potensi Cadangan Gas Bumi (TSCF)	170,7	172			-
			c. Potensi Cadangan CBM (TSCF)	-	24			-
			Jumlah Sumber Daya Minyak dan Gas Bumi dan CBM	163,64 BBOE	190,76 BBOE			6,24
			Jumlah laporan sumber daya migas dan CBM di seluruh cekungan Indonesia	1 lap	5 lap ^{K)}			-

PRIORITAS BIDANG: Ketahanan dan Kemandirian Energi

NO	FOKUS PRIORITAS /KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil Outcomes/Output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN / LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
			Jumlah persetujuan Plan of Development (POD) I	2	37 ^{K)}			6,59
			Jumlah persetujuan harga gas bumi	15	78 ^{K)}			7,70
			Jumlah persetujuan amandemen dan atau perpanjangan kontrak	3	15 ^{K)}			1,99
			Jumlah persetujuan Participating Interest (PI) kepada BUMD atau perusahaan nasional terkait dengan POD I.	2	21 ^{K)}			2,37
			Prosentase pengembangan dan pemanfaatan gas bumi.	97%	99%			4,52
			Prosentase penyerahan data minyak dan gas bumi dan CBM.	90%	95%			4,42
			Prosentase pengelolaan data dan informasi bidang eksplorasi dan eksploitasi migas.	90%	95%			5,84

PRIORITAS BIDANG: Ketahanan dan Kemandirian Energi

NO	FOKUS PRIORITAS /KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil Outcomes/Output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN / LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
			Prosentase perkembangan penanganan tumpang tindih lahan.	20%	60%			1,30
			Prosentase Pengelolaan, Pembahasan dan Evaluasi Laporan Kegiatan KKKS dari BPMIGAS.	100%	100%			5,51
c.	Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi	Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan teknologi minyak dan gas bumi.	Jumlah Kegiatan Penelitian dan Pengembangan	47	179 ^{ki)}	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	KESDM	359,93
			o Jumlah Kontrak Pelayanan Jasa Teknologi	40	244 ^{ki)}			-
			o Jumlah Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) kegiatan Jasa Penelitian dan Pengembangan terhadap target yang ditetapkan (Dalam Juta Rp)	45.495	338557,2 ^{ki)}			336,42

PRIORITAS BIDANG: Ketahanan dan Kemandirian Energi

NO	FOKUS PRIORITAS /KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil Outcomes/Output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN / LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
d.	Survei dan Pelayanan Geologi	Meningkatnya pemanfaatan hasil survei penelitian, penyelidikan dan pelayanan geologi	Jumlah wilayah/kawasan pemetaan geologi bersistem dan bertema	2	10 ^{K)}	PROGRAM PENELITIAN, MITIGASI DAN PELAYANAN GEOLOGI	KESDM	348,67
			Jumlah peta geofisika bersistem dan bertema yang dihasilkan	2	14 ^{K)}			432,14
			Jumlah peta geokimia yang dihasilkan	6	30 ^{K)}			34,70
			Jumlah peta seismotektonik yang dihasilkan	2	10 ^{K)}			15,36
			Jumlah peta geomorfologi yang dihasilkan	2	10 ^{K)}			15,36
			Jumlah peta geologi kuartar yang dihasilkan	2	10 ^{K)}			21,83
			Jumlah perolehan / pendaftaran sistim mutu	7	35 ^{K)}			11,05
e.	Penyelidikan dan Pelayanan Sumber Daya Geologi	Meningkatnya pemanfaatan wilayah keprospekaan sumber daya geologi	Jumlah lokasi Penyelidikan status keprospekaan sumber daya Panas bumi	22	110 ^{K)}			154,72
			Jumlah lokasi Penyelidikan status keprospekaan sumber daya Batubara dan CBM	18	90 ^{K)}			480,73

PRIORITAS BIDANG: Ketahanan dan Kemandirian Energi

NO	FOKUS PRIORITAS /KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil Outcomes/Output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN / LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
			Jumlah lokasi Penyelidikan status keprospekan sumber daya Gambut dan Bitumen	5	25 ^{k)}			16,58
			Jumlah lokasi Penyelidikan status keprospekan sumber	28	144 ^{k)}			88,41
			Jumlah kegiatan kajian/evaluasi WKP dan WP	8	40 ^{k)}			57,47
2	Peningkatan produktivitas dan pemerataan pemanfaatan energi, serta penggunaan energi terbarukan							842,54
a	Pembinaan dan Pengusahaan Panas Bumi dan Air Tanah	Tercapainya target kontribusi PLTP pada program 10.000 MW tahap II	Jumlah kapasitas PLTP terpasang sebesar 5795 MW di tahun 2014	1.261	5.795	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGUSAHAAN MINERAL. BATUBARA. PANAS BUMI DAN AIR TANAH		357,891
		Tersedianya regulasi bidang panas bumi dan air tanah	Jumlah regulasi panas bumi dan air tanah	20	50 ^{k)}			
			Jumlah PNB dari sektor panas bumi (ribu USD)	63.961	188.867			

PRIORITAS BIDANG: Ketahanan dan Kemandirian Energi

NO	FOKUS PRIORITAS /KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil Outcomes/Output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN / LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
		Tercapainya target produksi listrik panas bumi	- Penyusunan klasifikasi data potensi dan cadangan panas bumi untuk ketenagalistrikan dan pemanfaatan langsung energi panas bumi	2 keg	10 keg ^{K)}			
			- Perencanaan produksi listrik dari panas bumi (MWh)	9.712.224	45.061.921			
		Tersedianya informasi investasi produksi industri minuman berbahan baku air tanah dari 33 provinsi	Jumlah lokasi penugasan survei pendahuluan untuk meningkatkan status potensi	6	30 ^{K)}			
b	Penelitian dan Pengembangan Teknologi Ketenagalistrikan dan Energi Baru Terbarukan	Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan teknologi ketenagalistrikan dan energi baru terbarukan.	Jumlah Kegiatan Penelitian dan Pengembangan	22	90 ^{K)}	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	KESDM	133,74
			o Jumlah Kontrak Pelayanan Jasa Teknologi	1	5 ^{K)}			-
			o Jumlah Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) kegiatan Jasa Penelitian dan Pengembangan terhadap target yang ditetapkan (Dalam Juta Rp)	200	200			0,80

PRIORITAS BIDANG: Ketahanan dan Kemandirian Energi

NO	FOKUS PRIORITAS /KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil Outcomes/Output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN / LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
c	Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman Tahunan (Prioritas Nasional dan Bidang)	Terfasilitasinya pengembangan budidaya tanaman tahunan (kelapa, kelapa sawit, karet, jambu mete, jarak pagar)	<p>Peningkatan luas areal (ribu hektar) pembinaan dan pengembangan tanaman tahunan</p> <p>Pengembangan Komoditas Ekspor</p> <p>Karet</p> <p>Jambu Mete</p> <p>Penyediaan bahan tanaman sumber bahan bakar nabati (bio energi)</p> <p>Jarak Pagar</p> <p>Kelapa</p> <p>Kelapa Sawit</p> <p>Revitalisasi perkebunan</p>	<p>3.445</p> <p>573</p> <p>10</p> <p>3.807</p> <p>8.127</p>	<p>3.488</p> <p>578</p> <p>22</p> <p>3.834</p> <p>8.988</p>	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	Deptan	350,1

PRIORITAS BIDANG: Ketahanan dan Kemandirian Energi

NO	FOKUS PRIORITAS /KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil Outcomes/Output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN / LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
			Kelapa sawit	125	148			
			Karet	10	51			
			Kakao	0	32			
			Penyusunan kebijakan Pengembangan bio energi Pengembangan Desa Mandiri Energi (DME) Koordinasi dengan pihak terkait dalam menyediakan insentif pajak untuk mendorong pemantapan energi terbarukan					
			Berpartisipasi aktif dalam Tim Koordinasi Interdept pengembangan bio-fuel Pengembangan integrasi kebun ternak (paket)	27				
TOTAL								3.192,80

(*) Target Sesuai Renstra ESDM hanya 1.010 MBOPD (kemampuan pelaksanaan)

PRIORITAS BIDANG: Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Mineral dan Pertambangan

NO	FOKUS PRIORITAS /KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil Outcomes/Output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN / LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
1	Peningkatan produksi dan nilai tambah produk pertambangan mineral dan batubara	Terjaminnya kebutuhan mineral dan batubara untuk kebutuhan industri dalam negeri Meningkatnya nilai tambah produk tambang	Jumlah produksi batubara, mineral (tembaga, perak, emas, timah, dsb), panas bumi Jumlah cadangan batubara, mineral, panas bumi Jumlah pasokan batubara ke dalam negeri					1.127,1
a	Kegiatan Penyusunan Kebijakan dan Program serta Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Mineral, Batubara dan Panas Bumi	Tersedianya pelayanan data dan informasi Mineral, Batubara, Panas Bumi dan air tanah secara lengkap, aktual dan on line;	Jumlah Pedoman/NSPK untuk aplikasi pengelolaan kegiatan pertambangan di Provinsi/Kabupaten/ Kota	8	35 k)	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGUSAHAAN MINERAL, BATUBARA, PANAS BUMI DAN AIR TANAH	KESDM	22,6

PRIORITAS BIDANG: Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Mineral dan Pertambangan

NO	FOKUS PRIORITAS /KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil Outcomes/Output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN / LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
		Terinventarisirnya potensi PNBP dari KP/IUP seluruh Indonesia; Tersedianya data on line PNBP, antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah; Terlaksananya dekonsentrasi penagihan PNBP KP terbitan daerah; Tersedianya data mineral, batubara, panas bumi dan air tanah secara on line antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah; Tersosialisasinya UU Nomor 4 Tahun 2009; Tumbuhnya perijinan IUP; Tersedianya data dan informasi peluang investasi pembangunan smelter mineral logam utama (Ni, Au, Cu, Al, Sn); Tersedianya data dan informasi infrastruktur penunjang pelabuhan angkut batubara; Meningkatnya pemanfaatan briket batubara; Terlaksananya pengembangan; Meningkatnya pemahaman aparat daerah dan pelaku tambang rakyat dalam pengelolaan/ pemahaman Pedoman Teknis Pertambangan Rakyat pertambangan skala kecil;	Verifikasi/ inventarisasi/ rekonsiliasi/ sosialisasi kajian PNBP bidang pertambangan mineral, batubara dan panas bumi	7 keg	8 keg			115,2
			Dana bagi hasil sektor pertambangan ke pemerintah daerah sesuai dan tepat waktu	90-92%	98-100%			
			Predikat Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK atas pencatatan PNBP sektor pertambangan berdasarkan Sistem Akuntansi Instansi Pemerintah (SAI)	Tercapai predikat WTP	Tercapai predikat WTP			
			Jumlah evaluasi pelaksanaan otonomi daerah dalam pengelolaan kegiatan pertambangan di pemerintah provinsi/kabupaten/kota	50 kab/kota	91 Kab/kota			

PRIORITAS BIDANG: Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Mineral dan Pertambangan

NO	FOKUS PRIORITAS /KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil Outcomes/Output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN / LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
			Pelaksanaan otonomi daerah dalam pengelolaan kegiatan pertambangan di pemerintah provinsi/ kabupaten/kota	50 kab/kota	91 Kab/kota			44,5
			Penyusunan kajian investasi di sektor mineral, batubara dan panas bumi	8 keg	40 keg k)			45,0
			Jumlah perencanaan produksi mineral, batubara dan panas bumi:					17,5
			a. Batubara (juta ton)	250	1.426 k)			
			b. Panas Bumi	70	4.616 k)			
			c. Mineral					
			- Tembaga (ton)	1.016.949	4.115.060 k)			
			- Emas (kg)	115.998	497.558 k)			
			- Perak (kg)	261.897	1.258.450 k)			
			- Logam Timah (ton)	105.000	530.250 k)			
			- Ni+Co in matte (ton)	77.700	421.358 k)			
			- Bijih Nikel (ton)	11.064.084	57.930.176 k)			
			- Feronikel (mt)	18.276	95.689 k)			
			- Bauksit (mt)	10.284.923	53.850.587 k)			
			- Intan (crt)	96.000	484.800 k)			
			- Bijih Besi (mt)	4.125.235	21.599.218 k)			
			- Granit (m3)	2.029.294	10.625.132 k)			

PRIORITAS BIDANG: Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Mineral dan Pertambangan

NO	FOKUS PRIORITAS /KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil Outcomes/Output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN / LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
			Penyusunan perumusan sistem prosedur teknis (inventarisasi, evaluasi, pemantauan, pembinaan aparat, identifikasi) perencanaan produksi	12 keg	60 k)			42,1
			Jumlah rencana pasokan batubara untuk kebutuhan dalam negeri (juta ton)	75	469 k)			7,0
			Pengembangan pemanfaatan briket batubara, pengembangan daerah percontohan dan optimalisasi nilai tambah mineral dan batubara	3 keg	15 k)			74,4
			Jumlah penetapan wilayah usaha pertambangan (WUP), Wilayah pencadangan negara (WPN), dan Wilayah ijin usaha Pertambangan (WIUP) mineral dan batubara	3	15 k)			64,8

PRIORITAS BIDANG: Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Mineral dan Pertambangan

NO	FOKUS PRIORITAS /KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil Outcomes/Output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN / LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
			Penetapan Wilayah Kerja Pertambangan (WKP) panas bumi	6	30 k)			3,3
			Jumlah buku data informasi mineral, batubara, panas bumi dan air tanah	1	7 k)			6,2
			Evaluasi Penggunaan Lahan Pertambangan	1	5 k)			5,0
b.	Pembinaan dan Pengusahaan Mineral dan Batubara	Terciptanya optimalisasi penerimaan negara khususnya dari sektor batubara diperlukan pengumpulan dan evaluasi data biaya penjualan dalam kaitannya dengan penetapan DHPB secara kontinu	Evaluasi dan verifikasi ketenagakerjaan sub sector mineral, batubara dan panas bumi	2 keg	10 k)	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGUSAHAAN MINERAL, BATUBARA, PANAS BUMI DAN AIR TANAH	KESDM	26,2
			Evaluasi pelaksanaan <i>Community Development</i>	4 keg	20 k)			30,3
		Terciptanya penguatan kelembagaan daerah dalam sektor pertambangan dalam rangka OTDA dan dekesentrasi, serta terlaksananya kertsama terpadu pusat, daerah, masyarakat dan pengusaha	Kajian (verifikasi dan inventarisasi) nilai tambah bahan galian tambang	6 Wilayah	9 Wilayah			5,5
		Terciptanya pengembangan batubara sebagai energi alternatif utama melalui peningkatan produksi, pemanfaatan dalam negeri, dll.	Jumlah terselesaikannya konflik tumpang tindih dalam wilayah PKP2B	10 Wilayah	12 Wilayah			5,2

PRIORITAS BIDANG: Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Mineral dan Pertambangan

NO	FOKUS PRIORITAS /KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil Outcomes/Output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN / LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
		Terciptanya bank data mineral dan batubara nasional yang komprehensif, sehingga dapat meningkatkan pelayanan di sektor mineral dan batubara	Jumlah penagihan PNPB bidang Minerba	34%	30%			7,5
		Terciptanya perusahaan mineral dan batubara yang kondusif	Persentase Realisasi Masterlist (pembelian dalam negeri dan impor) perusahaan KK dan PKP2B	33%:67%	42%:58%			20,9
		Terciptanya penanggulangan PETI melalui program verifikasi terhadap perusahaan tambang	Jumlah Divestasi dan Perubahan Saham Bidang Mineral dan Batubara	33 Perusahaan	32 Perusahaan			10,3
		Terlaksananya inventarisasi batubara mutu rendah dan cara peningkatan nilai tambahnya	Persentase penggunaan kandungan lokal (local content) untuk menunjang pembangunan berkelanjutan	Naik 2 %	Naik 3 %			17,2
		Terlaksananya promosi kepentingan nasional dalam rangka pelaksanaan dan pembinaan usaha jasa mineral dan batubara dan peningkatan local content	Sistem yang terintegrasi, mudah digunakan, handal dan pelayanan publik yang lebih baik.	6 sistem	6 sistem			3,3
			Jumlah Perusahaan yang diawasi kegiatan usaha pertambangannya	42 KK dan 76 PKP2B	42 KK dan 76 PKP2B			12,5
			Tersusunnya laporan akuntabilitas Kinerja DBM	1 LAKIP	5 LAKIP			2,3

PRIORITAS BIDANG: Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Mineral dan Pertambangan

NO	FOKUS PRIORITAS /KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil Outcomes/Output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN / LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
			Jumlah perusahaan KK dan PKP2B Eksplorasi dan FS yang dievaluasi RKAB nya	42 KK dan 76 PKP2B	42 KK dan 76 PKP2B			5,0
			Jumlah laporan kegiatan perusahaan KK dan PKP2B yang dievaluasi	20 provinsi dan 30 perusahaan KK/ PKP2B	20 provinsi dan 30 perusahaan KK/ PKP2B			10,0
			Jumlah Neraca cadangan, sumberdaya dan cadangan Izin usaha, KK dan PKP2B yang dievaluasi	5 cadangan Izin Usaha dan 20 KK	5 cadangan Izin Usaha dan 20 KK			13,2
			Jumlah Kebijakan eksplorasi perusahaan induk (<i>principal</i>) dari perusahaan tambang yang beroperasi di Indonesia yang dievaluasi	40 KK/20 PKP2B	40 KK/20 PKP2B			12,5

PRIORITAS BIDANG: Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Mineral dan Pertambangan

NO	FOKUS PRIORITAS /KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil Outcomes/Output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN / LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
			Jumlah laporan rencana kerja dalam amandemen kontrak/perjanjian Minerba yang dievaluasi	42 KK dan 76 PKP2B	42 KK dan 76 PKP2B			3,9
			Jumlah Pengadaan alat-alat software, sistem pengawasan eksplorasi dan penyampaian laporan kegiatan eksplorasi perusahaan	1 software, 2 sistem dan 5 unit	1 software, 2 sistem dan 5 unit			26,5
			Jumlah seminar prospek eksplorasi Sumber Daya Mineral batubara di Indonesia	1 provinsi	5 provinsi k)			5,5
			Jumlah Pedoman untuk perusahaan KK/PKP2B dan Kajian tahap Produksi Mineral	1 Pedoman dan 10 KK	1 Pedoman dan 10 KK			23,1

PRIORITAS BIDANG: Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Mineral dan Pertambangan

NO	FOKUS PRIORITAS /KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil Outcomes/Output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN / LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
			Jumlah pengawasan produksi kepada perusahaan KK dan PKP2B	Produksi: 10KK/ 45PKP2B Konstruksi: 5 KK/ 15 PKP2B	Produksi: 10KK/ 45PKP2B Konstruksi: 5 KK/ 15 PKP2B			52,8
			Evaluasi Rencana dan Pelaksanaan Kegiatan Perusahaan KK dan PKP2B	Produksi: 10KK/ 45PKP2B Konstruksi: 5 KK/ 15 PKP2B	Produksi: 10KK/ 45PKP2B Konstruksi: 5 KK/ 15 PKP2B			7,7
			Jumlah invoice/kontrak penjualan KK/ PKP2B yang dievaluasi	10 KK/ 45 PKP2B	14 KK/ 45 PKP2B			60,3
			Jumlah KP Mineral di Sulteng dan Sultra & batubara di Kalsel dan Kaltim yang diinventarisir	700	800			3,5
			Jumlah daerah yang terkait dengan aktivitas Pertambangan Tanpa Izin (PETI)	3 Prov. 25 Kab	3 Prov. 25 Kab			20,2

PRIORITAS BIDANG: Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Mineral dan Pertambangan

NO	FOKUS PRIORITAS /KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil Outcomes/Output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN / LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
			Jumlah proses Persetujuan Prinsip, Peningkatan Tahap dan Perubahan Luas Wilayah KK dan PKP2B	42 KK 76 PKP2B	42 KK 76 PKP2B			5,4
			Jumlah dokumen elektronik berupa rekapitulasi data perizinan IUP, IUPK, KK dan PKP2B	500	700			4,6
			Jumlah lokasi pelaksanaan pembinaan perizinan perusahaan mineral dan batubara	3 Provinsi 25 Kab	3 Provinsi 25 Kab			20,3
			Jumlah lokasi pelaksanaan sosialisasi PP tentang Pengusahaan Pertambangan Minerba Sebagai Pelaksanaan UU No.4 Tahun 2009	5 Provinsi	25 Provinsi			10,3
			Peningkatan mutu serta kinerja pelayanan Pelayanan Usaha Minerba dalam menjalankan tugas dan fungsinya	1 PKT	1 PKT			3,8

PRIORITAS BIDANG: Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Mineral dan Pertambangan

NO	FOKUS PRIORITAS /KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil Outcomes/Output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN / LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
			Persentase Pelaksanaan Pedoman	1 pedoman	5 pedoman			3,8
			Jumlah kontrak KK dan PKP2B yang sudah di amandemen	42 KK 76 PKP2B	42 KK 76 PKP2B			9,9
c.	Pembinaan dan Pengusahaan Panas Bumi dan Air Tanah	Tercapainya target PNB dari sektor panas bumi	Verifikasi/ inventarisasi/ rekonsiliasi/ sosialisasi kajian PNB bidang pertambangan panas bumi	1 pkt	5 pkt	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGUSAHAAN MINERAL, BATUBARA, PANAS BUMI DAN AIR TANAH	KESDM	19,3
		Tercapainya target pemanfaatan langsung panas bumi	Pelaksanaan penugasan survei pendahuluan untuk meningkatkan status potensi	6	30 k)			4,6
		Tersedianya data potensi panas bumi yang menarik bagi investor	Jumlah inventarisasi pajak air tanah (provinsi)	6	33 k)			10,5
		Tersedianya informasi yang lengkap tentang pajak air tanah di daerah dari 33 provinsi	Penetapan Zona Pemanfaatan Air Tanah (CAT)	6	33 k)			34,3
		Tersedianya zona pemanfaatan air tanah dari 33 provinsi	Jumlah inventarisasi investasi produksi industri minuman berbahan baku air tanah (Provinsi)	1	5 k)			7,7

PRIORITAS BIDANG: Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Mineral dan Pertambangan

NO	FOKUS PRIORITAS /KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil Outcomes/Output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN / LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
d.	Penelitian dan Pengembangan Teknologi Mineral dan Batubara	Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan teknologi mineral dan batubara.	Jumlah Kegiatan Penelitian dan Pengembangan	44	216 k)	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	KESDM	142,3
			Jumlah Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) kegiatan Jasa Penelitian dan Pengembangan terhadap target yang ditetapkan (Dalam Juta Rp)	3.028	17.518 k)			17,5
2.	Pengurangan dampak negatif akibat kegiatan pertambangan, krisis energi, dan bencana geologi	Terhindarnya kerusakan lingkungan, baik itu air, tanah, maupun udara, yang berlebihan akibat kegiatan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya mineral dan batubara Tersedianya informasi geologi dan informasi sumber daya yang berkualitas	Peta geologi dan kawasan rawan bencana gunung api aktif, dan daerah krisis energi Jumlah lokasi reklamasi dan pasca tambang dan peningkatan kualitas baku mutu air limbah kegiatan tambang					727,2

PRIORITAS BIDANG: Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Mineral dan Pertambangan

NO	FOKUS PRIORITAS /KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil Outcomes/Output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN / LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
			Pengurangan volume gas flare, limbah, dan peningkatan penggunaan bahan-bahan kimia dan lumpur pemboran ramah lingkung					
a.	Pembinaan Keteknikan Lindungan Lingkungan dan Usaha Penunjang Bidang Mineral. Batubara, Panas Bumi dan Air Tanah	Meningkatnya kompetensi KTT dan penanggung jawab kegiatan di lapangan pada IUP (KP)	Prosentase penjaminan reklamasi dan pasca tambang pada kegiatan usaha pertambangan	100%	100%	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGUSAHAAN MINERAL. BATUBARA. PANAS BUMI DAN AIR TANAH		3,6
			Prosentase kualitas baku mutu air limbah tambang pada kegiatan usaha pertambangan	100%	100%			2,7
b.	Pembinaan Keteknikan Lindungan Lingkungan dan Usaha Penunjang Bidang Mineral. Batubara, Panas Bumi dan Air Tanah	Tersedianya sebanyak 200 standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang lindungan lingkungan, keselamatan pertambangan, standarisasi, teknik pertambangan serta usaha jasa pertambangan minerbapabum	Jumlah rancangan SNI dan SKKNI bidang pertambangan Minerbapabum	5 SNI & 4 SKKNI	5 SNI & 4 SKKNI	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGUSAHAAN MINERAL. BATUBARA. PANAS BUMI DAN AIR TANAH	KESDM	16,2

PRIORITAS BIDANG: Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Mineral dan Pertambangan

NO	FOKUS PRIORITAS /KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil Outcomes/Output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN / LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
		Terciptanya kegiatan pertambangan mineral, batubara dan panas bumi yang memenuhi kaidah <i>good mining practice</i>	Jumlah kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara yang taat melakukan pelaksanaan reklamasi lahan bekas tambang	60	64			8,3
		Tersedianya 1000 orang inspektur tambang di seluruh Indonesia dan peningkatan kemampuan teknis melalui diklat pusat maupun daerah	Jumlah kompetensi tenaga kerja industri pertambangan minerbapabum melalui sertifikasi	100	200			7,6
		Meningkatnya kompetensi KTT dan penanggung jawab kegiatan di lapangan pada IUP (KP)	Persentase recovery penambangan dan pengolahan terkait konservasi bahan galian pada kegiatan usaha pertambangan	85	95			8,5
			Tingkat kekerapan kecelakaan pada perusahaan pertambangan	0,74	0,66			3,5
			Luas lahan kegiatan usaha pertambangan yang reklamasi oleh pemegang usaha pertambangan	6000 ha	6500 ha			9,1

PRIORITAS BIDANG: Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Mineral dan Pertambangan

NO	FOKUS PRIORITAS /KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil Outcomes/Output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN / LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
			Jumlah peraturan menteri tentang pembinaan dan pengawasan kegiatan usaha pertambangan	6	23 k)			9,5
			Jumlah norma/pedoman teknis/juknis/kriteria aspek K3, keselamatan operasi, teknis pertambangan, lingkungan, usaha jasa dan standardisasi	14	146 k)			27,3
			Jumlah usaha jasa lokal dan nasional yang berusaha di bidang usaha jasa pertambangan	600	3550 k)			20,7
			Jumlah SNI/SKKNI hasil kaji ulang	6	36 k)			3,8
			Jumlah Propinsi/perguruan tinggi/perusahaan yang memahami dengan baik system kompetensi dan SNI	3	15 k)			4,0
			Jumlah Perusahaan yang menerapkan standar	15	20			4,0

PRIORITAS BIDANG: Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Mineral dan Pertambangan

NO	FOKUS PRIORITAS /KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil Outcomes/Output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN / LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
			Jumlah Pemda yg melaksanakan pengelolaan usaha pertambangan yg benar	20	20			11,5
			Jumlah perusahaan yang laik secara teknik	60	60			16,9
			Jumlah Inventarisasi daerah yg terkena dampak pengolahan emas menggunakan bahan kimia	3	3			3,0
			Jumlah perusahaan tambang yg melakukan perencanaan pasca tambang sesuai dengan tata guna lahan	15	15			3,3
			Jumlah Inventarisasi Penguasaan dan penetapan teknologi perusahaan	3	3			2,0
			Jumlah pengawasan perusahaan usaha jasa	40	40			8,7
			Jumlah perusahaan yang dinilai dlm rangka penilaian prestasi K3	60	60			3,3
			Jumlah tim yg berperan dlm fire & rescue challenge regional	19	20			4,0

PRIORITAS BIDANG: Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Mineral dan Pertambangan

NO	FOKUS PRIORITAS /KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil Outcomes/Output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN / LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
			Jumlah penda yg berperan aktif dlm pengawasan K3	40	40			5,6
			Jumlah perusahaan yg dinilai dlm rangka prestasi pengelolaan lingkungan	45	45			6,3
			Penyelesaian kasus lingkungan	100%	100%			3,9
			Jumlah perusahaan yg berperan dlm meningkatkan nilai tambah, pegelolaan pertambangan dengan baik	15	15			23,4
			Jumlah Laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	1	5 k)			1,6
			Jumlah kepala dinas dan aparat yang meningkat memahaminya dalam GMP	50	50			23,0
			Jumlah SDM yg meningkat kemampuan keteknikan dan lingkungan	50	50			18,6

PRIORITAS BIDANG: Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Mineral dan Pertambangan

NO	FOKUS PRIORITAS /KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil Outcomes/Output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN / LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
c.	Mitigasi dan Pelayanan Kebencanaan Geologi	Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dan penyelidikan di bidang vulkanologi dan mitigasi bencana geologi	Jumlah Peta Geologi Gunungapi Aktif	2	10 k)	PROGRAM PENELITIAN, MITIGASI DAN PELAYANAN GEOLOGI	KESDM	17,7
			Jumlah Peta Kawasan Rawan Bencana Gunungapi Aktif Skala 1:50,000	1	5 k)			8,3
			Jumlah peta yang diterbitkan Peta Zona Kerentanan Gerakan Tanah	5	25 k)			34,4
			Jumlah peta yang diterbitkan Peta Kawasan Rawan Bencana Gempabumi dan Tsunami	3	15 k)			15,1
			Jumlah gunung api yang dipantau untuk kegiatan gunungapi aktif tipe A dari Pos Pengamatan Gunungapi	10	66 k)			50,2

PRIORITAS BIDANG: Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Mineral dan Pertambangan

NO	FOKUS PRIORITAS /KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil Outcomes/Output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN / LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
			Jumlah kegiatan pemahaman masyarakat tentang kebencanaan geologi melalui pelatihan kebencanaan, pameran, dan pembuatan film yang lebih intensif	7	35 k)			3,9
			Jumlah Pedoman/peraturan/norma Mitigasi Bencana Gunungapi dan Pedoman Gerakan Tanah, Gempabumi dan Tsunami	2	10 k)			8,1
			Jumlah layanan pemberian rekomendasi teknis hasil mitigasi bencana geologi;	1	5 k)			10,5
d.	Riset dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi	Meningkatnya pemanfaatan hasil pengembangan metoda dan teknologi dalam mendukung upaya mitigasi bencana geologi	Jumlah perangkat sistem monitoring kegunungapian hasil rancang bangun sendiri di 20 gunung api	4	20 k)	PROGRAM PENELITIAN, MITIGASI DAN PELAYANAN GEOLOGI	KESDM	13,8
			Jumlah data geokimia gunungapi di 25 gunungapi	4	25 k)			19,3
			Jumlah kegiatan mitigasi di kawasan Bencana G. Merapi	15	80 k)			24,0

PRIORITAS BIDANG: Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Mineral dan Pertambangan

NO	FOKUS PRIORITAS /KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil Outcomes/Output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN / LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
e.	Fasilitasi dalam rangka penetapan langkah-langkah penanggulangan krisis dan darurat energi, serta pengawasan pelaksanaan kebijakan energi lintas sektor	Meningkatnya data dan informasi dalam rangka mengidentifikasi daerah rawan krisis.	Jumlah data dan informasi untuk identifikasi daerah krisis.	6 prov.	33 k)	PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA DEWAN ENERGI NASIONAL	KESDM	6,1
			Jumlah data dan informasi dalam penyusunan kriteria pedoman penanggulangan krisis dan darurat energi.	1 pkt	5 pkt k)			5,9
			Jumlah data dan informasi dalam penyusunan skenario penanggulangan krisis dan darurat energi.	1 pkt	5 pkt k)			6,1
		Meningkatnya pengawasan pelaksanaan kebijakan energi	Jumlah laporan pengawasan pelaksanaan KEN.	1 pkt	5 pkt k)	0,9		
		Jumlah laporan pengawasan implementasi EBT	1 pkt	5 pkt k)	2,4			

PRIORITAS BIDANG: Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Mineral dan Pertambangan

NO	FOKUS PRIORITAS /KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil Outcomes/Output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN / LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
			Jumlah data dan informasi teknis dalam mendukung pengawasan pelaksanaan kebijakan penyediaan dan pemanfaatan energi	1 pkt	5 pkt k)			6,1
		Meningkatnya koordinasi dalam rangka penyusunan perumusan pedoman penanggulangan krisis energi dan	Penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi.	1 pkt	5 pkt k)			0,9
			Laporan hasil evaluasi Kegiatan fasilitasi penanggulangan krisis dan darurat energi.	--	4pkt k)			0,9
			umlah rapat rapat dalam rangka penyusunan pedoman dan rapat koordinasi evaluasi dalam rangka fasilitasi penanggulangan krisis dan darurat energi.		4 pkt k)			0,9
f	Pembinaan Lindungan Lingkungan, Keselamatan Operasi dan Usaha Penunjang Bidang Migas	Pembinaan dan Pengawasan Keandalan Infrastruktur,K3, Keselamatan Operasi, dan Lingkungan, serta Usaha Penunjang dan Teknis serta Standardisasi	Prosentase pengurangan volume pembakaran <i>gas flare</i> (%)	60	100	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENYEDIAAN MINYAK DAN GAS BUMI	KESDM	4,1

PRIORITAS BIDANG: Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Mineral dan Pertambangan

NO	FOKUS PRIORITAS /KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil Outcomes/Output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN / LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
			Prosentase pengurangan volume pembuangan air limbah ke lingkungan (%)	20	74			35,1
			Prosentase pengurangan volume limbah pada sumbernya (%)	20	47			6,5
			Prosentase peningkatan jumlah penggunaan bahan, bahan kimia dan lumpur bor yang ramah lingkungan	50	100			2,8
			Prosentase Penurunan Jumlah tingkat kegagalan operasi infrastruktur kegiatan usaha hilir Migas	penurunan tingkat kegagalan operasi infrastruktur pada 50 BU	penurunan tingkat kegagalan operasi infrastruktur pada 75 BU			26,6
			Prosentase penurunan jumlah tingkat kecelakaan kerja operasi kegiatan usaha hulu migas	70%	80%			22,5
			Prosentase peningkatan pemahaman peraturan keselamatan operasi kegiatan usaha migas (%)	20	100			6,9

PRIORITAS BIDANG: Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Mineral dan Pertambangan

NO	FOKUS PRIORITAS /KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil Outcomes/Output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN / LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
			Prosentase peningkatan penggunaan sistem basis data usaha penunjang migas dalam operasi internal (%)	0	5			4,5
			Jumlah tersedianya Rancangan Standar Nasional Indonesia untuk kegiatan usaha migas (buah)	5	5			29,9
			Jumlah tersedianya Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (RSKKNI) untuk kegiatan usaha migas	3	3			29,9
			Prosentase tingkat kegagalan operasi kegiatan hilir migas (%)	30%	23%			13,5
			Prosentase penurunan angka kecelakaan kerja kegiatan usaha migas	20%	100			1,6

PRIORITAS BIDANG: Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Mineral dan Pertambangan

NO	FOKUS PRIORITAS /KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil Outcomes/Output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN / LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
			Prosentase peningkatan kemampuan nasional dalam merancang dan merakit instalasi peralatan migas	Tercapainya prosentase peningkatan kemampuan nasional dalam merancang dan merakit sistem alat ukur migas sebesar 60 %	Tercapainya prosentase peningkatan kemampuan nasional dalam merancang dan merakit sistem alat ukur migas sebesar 80 %			43,8
TOTAL								1.854,3

PRIORITAS BIDANG: Perbaikan Kualitas Lingkungan Hidup

NO	FOKUS PRIORITAS /KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil Outcomes/Output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
1	Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Menurunnya tingkat pencemaran lingkungan dan meningkatnya usaha-usaha pengendalian perusakan lingkungan						920,3
a.	Pengendalian Pencemaran Air	Menurunnya beban pencemar air dari industri yang dipantau dan diawasi	Jumlah industri pertambangan, energi dan migas yang dipantau dan diawasi Jumlah agroindustri yang dipantau dan diawasi Jumlah industri manufaktur yang dipantau dan diawasi Jumlah industri yang taat terhadap peraturan LH Jumlah izin pembuangan air limbah ke laut yang dikeluarkan Jumlah pedoman teknis/peraturan perundang-undangan	200 220 260 480 20 2	220 245 330 720 100 ^{K)} 26 ^{K)}	Program Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	KLH	142,0

NO	FOKUS PRIORITAS /KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil Outcomes/Output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
b.	Pengendalian Pencemaran Limbah Domestik	Meningkatnya kinerja pengelolaan limbah domestik (sampah) di kota-kota yang dipantau	Jumlah kota metropolitan dan besar yang dipantau	27	27	Program Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	KLH	91,1
		Jumlah ibukota provinsi yang dipantau	20	20				
		Jumlah penurunan beban pencemar dari sumber limbah cair domestik dari kegiatan apartemen dan perumahan mewah di 3 propinsi (Banten, DKI Jakarta, dan Jawa Barat)	10%	10%				
		Jumlah pedoman teknis di bidang pengelolaan limbah domestik	2	10 ^{ki}				
		% capaian peningkatan kinerja pengelolaan sampah melalui pengawasan	50%	75%				
		% volume pengurangan sampah melalui 3 R (<i>Reduce, Reuse, Recycle</i>) dalam skala kota untuk kota besar dan metropolitan [dari baseline data tahun 2008]	2,50%	15%				
c.	Pengendalian Pencemaran Limbah Usaha Skala Kecil	Meningkatnya pengelolaan usaha skala kecil	Jumlah pedoman teknis di bidang pengendalian pencemaran limbah usaha skala kecil	1	5 ^{ki}	Program Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	KLH	74,0
		Jumlah sentra usaha skala kecil yang dibina	3	39 ^{ki}				
		Jumlah penurunan beban pencemar dari sentra usaha skala kecil yang dibina	80%	80%				

NO	FOKUS PRIORITAS /KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil Outcomes/Output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
d.	Pengelolaan B3 dan Limbah B3 Kegiatan Pertambangan, Energi, Minyak dan Gas	Meningkatnya kebijakan dan penerapan pengelolaan B3 dan limbah B3 serta meningkatnya jumlah limbah B3 yang dikelola dalam kegiatan pertambangan, energi, minyak dan gas	<p>Jumlah produk perumusan kebijakan dan/atau standar dan/atau pedoman pengelolaan B3 & limbah B3 kegiatan pertambangan, energi, minyak dan gas [Draft Permen LH]</p> <p>Jumlah kegiatan pemantauan dan/atau analisis dan/atau evaluasi pelaksanaan kebijakan pengelolaan B3 & limbah B3 kegiatan pertambangan, energi, minyak dan gas</p> <p>Jumlah perusahaan yang mendapat pengawasan kinerja penerapan pengelolaan B3 & limbah B3 kegiatan pertambangan, energi, minyak dan gas</p> <p>Jumlah daerah dan/atau perusahaan yang mendapat bimbingan teknis pengelolaan B3 & limbah B3 kegiatan pertambangan, energi, minyak dan gas</p> <p>Jumlah lingkup kegiatan dari seluruh ketentuan konvensi internasional pengelolaan B3 dan Limbah B3 yang ada</p>	1	5 ^{K)}	Program Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	KLH	106,0
				1	5 ^{K)}			
				200	220			
				5	10			
				3	19 ^{K)}			

NO	FOKUS PRIORITAS /KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil Outcomes/Output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
e.	Pengelolaan B3 dan Limbah B3 Manufaktur, Agroindustri dan Jasa	Meningkatnya kebijakan dan pertimbangan teknis dalam pengawasan penerapan pengelolaan limbah B3 serta meningkatnya jumlah limbah B3 yang dikelola dalam kegiatan manufaktur, agroindustri dan jasa	<p>Jumlah kebijakan, pedoman teknis yang diterapkan dalam Pengelolaan Limbah B3 pada kegiatan manufaktur dan agroindustri [dalam bentuk pedoman]</p> <p>Jumlah pengawasan kinerja industri yang dilakukan pembinaan dan pengawasan</p> <p>Jumlah daerah dan/ atau perusahaan yang mendapat bimbingan teknis pengelolaan B3 & limbah B3 kegiatan manufaktur agroindustri dan jasa</p> <p>Jumlah lingkup kegiatan dalam pelaksanaan ketentuan konvensi internasional pengelolaan B3 dan limbah B3 (dari seluruh ketentuan internasional yang ada)</p>	2	10 ^{k)}	Program Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	KLH	107,8
				480	575			
				5	45 ^{k)}			
				4	20 ^{k)}			

NO	FOKUS PRIORITAS /KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil Outcomes/Output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
f.	Administrasi Pengelolaan B3 dan Limbah B3	Meningkatnya penaatan pengelolaan bahan dan limbah B3	Jumlah kebijakan/ pedoman/ standar/ data base yang dihasilkan dalam rangka kegiatan administrasi pengelolaan B3 & limbah B3 [Permen LH dan pedoman]	2	14 ^{ki}	Program Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	KLH	88,8
			Jumlah registrasi B3 dan rekomendasi, ijin dan notifikasi pengelolaan limbah B3	1.000	5000 ^{ki}			
			Jumlah provinsi yang mendapat bimbingan teknis administrasi pengelolaan B3 & limbah B3	5	33			
			Jumlah kegiatan dalam pelaksanaan ketentuan konvensi internasional pengelolaan B3 dan Limbah B3 (dari seluruh ketentuan internasional yang ada)	4	20 ^{ki}			

NO	FOKUS PRIORITAS /KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil Outcomes/Output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
g.	Pengelolaan Kualitas Air dan Kawasan Gambut	Tersedianya perangkat kebijakan pengelolaan kualitas air, ekosistem gambut dan ekosistem danau yang terpadu dan bersifat lintas K/L, antara lain dengan Kemen PU, Kemenhut, Kementan, dan pemda	% penyiapan penetapan kelas air di tingkat kabupaten/kota untuk 13 sungai-sungai prioritas dari 119 kabupaten/kota, yang terkoordinasi lintas K/L dan daerah	25%	100% ^{*)}	Program Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	KLH	150,5
		Jumlah pembinaan teknis pengelolaan kualitas air terhadap 119 kabupaten/kota di 13 DAS, yang terkoordinasi dengan K/L terkait	20%	100% ^{*)}				
		% penyiapan pemetaan kesatuan hidrologi gambut yang terkoordinasi dengan K/L terkait	10%	100% ^{*)}				
		Jumlah provinsi dilakukannya verifikasi karakteristik ekosistem gambut yang terkoordinasi dengan K/L terkait	1	33 ^{*)}				
		Tersusunnya Program dan Rencana Aksi Terpadu Pengelolaan Ekosistem 15 Danau Prioritas Berkelanjutan yang terkoordinasi dengan K/L terkait	15	15				
		Jumlah pemantauan dan evaluasi pengendalian kerusakan ekosistem situ yang terkoordinasi dengan K/L terkait	3	11				
		Terimplementasinya kegiatan <i>Integrated Citarum Water Resources Management (ICWRM)</i> ADB Loan	20%	100%	26,0			

NO	FOKUS PRIORITAS /KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil Outcomes/Output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
h.	Peningkatan Konservasi Keanekaragaman Hayati	Meningkatkan kualitas kebijakan untuk menangani konservasi keanekaragaman hayati	Jumlah dokumen laporan dan rekomendasi kebijakan konservasi keanekaragaman hayati	3	15 ^{*)}	Program Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	KLH	75,8
			Jumlah rekomendasi kajian kebijakan konservasi keanekaragaman hayati diimplementasikan	1	5 ^{*)}			
			Jumlah hasil rekomendasi pemantauan pelaksanaan kebijakan konservasi keanekaragaman hayati yang ditindaklanjuti	1	5 ^{*)}			
			Jumlah daerah kegiatan pemantauan pelaksanaan kegiatan konservasi keanekaragaman hayati	10	50 ^{*)}			
			Terfasilitasinya pengembangan program Taman Keanekaragaman Hayati di beberapa daerah	2	10 ^{*)}			

NO	FOKUS PRIORITAS /KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil Outcomes/Output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
i	Pemulihan dan Penanganan Media Lingkungan (Lahan, Pesisir dan Perairan) Tercemar Limbah B3	Meningkatnya kebijakan, pertimbangan teknis dan pengawasan penataan pelaksanaan pengelolaan limbah B3 dalam rangka pemulihan kualitas media lingkungan akibat pencemaran limbah B3	Jumlah kebijakan/ pedoman/ standar yang dihasilkan dalam rangka pemulihan kualitas media lingkungan tercemar Limbah B3 [draft kebijakan]	3	7 ^{K)}	Program Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	KLH	58,2
		Jumlah lokasi pemantauan media lingkungan tercemar limbah B3 [status rencana pemulihan]	30	30				
		Jumlah lokasi pengawasan pengelolaan limbah di pelabuhan (umum dan khusus)	5	25 ^{K)}				
		Jumlah pengawasan kegiatan pemulihan kualitas media lingkungan [status penanganan media lingkungan tercemar limbah B3]	8	50 ^{K)}				
		Jumlah pelaksanaan sistem tanggap darurat pengelolaan B3 dan limbah B3 [draft Permen LH]	1	5 ^{K)}				
		Jumlah lingkup kegiatan dalam pelaksanaan ketentuan konvensi internasional pengelolaan B3 dan Limbah B3 (dari seluruh ketentuan Internasional yang ada)	3	15 ^{K)}				
		Jumlah publikasi/modul informasi pengelolaan B3 dan limbah B3	2	10 ^{K)}				

NO	FOKUS PRIORITAS /KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil Outcomes/Output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
2.	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan SDA dan LH	Meningkatnya kapasitas kelembagaan, partisipasi masyarakat, dan ketersediaan data dan informasi untuk pengelolaan lingkungan hidup						619,7
a.	Pengembangan Kelembagaan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Meningkatnya kapasitas kelembagaan yang menangani pengelolaan lingkungan hidup daerah	<p>% pengembangan kebijakan kelembagaan lingkungan hidup</p> <p>% pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang LH di daerah provinsi setiap tahun</p> <p>% terlaksananya monev dan pembinaan Penerapan SPM bidang LH terhadap pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota di lembaga LH daerah provinsi setiap tahun</p> <p>% terlaksananya Kerja Sama Antar Daerah (KSAD) dalam PLH (sampai keluarnya MoU dalam pengelolaan LH di daerah) di 10 daerah provinsi dan daerah kab/kota</p> <p>Updating basis data peta kelembagaan lingkungan hidup daerah untuk lembaga LH kab/kota dan provinsi</p> <p>Diterapkannya pedoman monitoring dan evaluasi kapasitas kelembagaan LH daerah di 520 Kabupaten/Kota setiap tahun</p> <p>Pembinaan revitalisasi kelembagaan lingkungan hidup daerah dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) bidang lingkungan hidup di 33 provinsi setiap tahun</p>	100%	100%	Program Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	KLH	67,7
				33	33			
				33	33			
				20%	100%			
				100%	100%			
				5%	75%			
				100%	100%			

NO	FOKUS PRIORITAS /KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil Outcomes/Output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
b.	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup	Meningkatnya kualitas kebijakan, partisipasi masyarakat dan lembaga kemasyarakatan yang terlibat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	<p>Terbentuknya kelompok masyarakat dan lembaga kemasyarakatan (EPW, Kaukus, Ormas, OKP, Profesi/Asosiasi, pengembangan perumahan yang berwawasan lingkungan dan CSR bidang lingkungan) yang berpartisipasi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup</p> <p>Meningkatnya keterlibatan jumlah kelompok masyarakat dan lembaga kemasyarakatan (EPW, Kaukus, Ormas, OKP, Profesi/Asosiasi, pengembangan perumahan yang berwawasan lingkungan dan CSR bidang lingkungan) dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di daerah</p> <p>Jumlah kelompok masyarakat bersama dengan Pemda yang terlibat dalam melaksanakan kegiatan 3 R (<i>Reduce, Reuse, Recycle</i>)</p>	45	246 ^{K)}	Program Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	KLH	70,3
				35	195 ^{K)}			
					200 ^{K)}			

NO	FOKUS PRIORITAS /KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil Outcomes/Output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
c.	Peningkatan Data, Informasi dan Infrastruktur Sistem Informasi Lingkungan Hidup	Tersedianya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dalam skala provinsi dan kabupaten/kota, dan meningkatnya kualitas data, informasi, dan sistem informasi pengelolaan lingkungan hidup	% Provinsi yang menyusun SLHD dari 33 Provinsi yang direncanakan % kabupaten/ kota yang menyusun SLHD dari 456 kabupaten/ kota yang direncanakan % jenis data sektor terkait tingkat pusat yang terkumpul dari 80 jenis data sektor yang direncanakan Jumlah kajian informasi yang diimplementasikan dalam kebijakan di bidang lingkungan hidup per tahun Jumlah aplikasi <i>e-gov</i> di bidang lingkungan hidup	55% 35% 60% 4 2	100% 100% 100% 20 30	Program Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	KLH	77,7

NO	FOKUS PRIORITAS /KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil Outcomes/Output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
d.	Peningkatan Sarana Teknis Pengendalian Dampak Lingkungan	Meningkatnya kualitas pemantauan lingkungan yang didukung dengan sarana pengendalian teknis dampak lingkungan yang berkualitas	% jumlah data pemantauan kualitas lingkungan (air, udara, tanah, kebisingan, deposisi asam, POP's, biologi)	30%	70%	Program Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	KLH	117,3
			% jumlah laboratorium pengujian parameter kualitas lingkungan yang dibina sesuai dengan peraturan yang berlaku	30%	70%			
			% jumlah pelatihan/ workshop/ seminar/ lokakarya yang diikuti oleh personil Pusarpedal	30%	70%			
			% jumlah sarana dan prasarana teknis Pusarpedal yang memenuhi kelayakan sesuai peraturan yang berlaku	30%	70%			
			% jumlah metode pengujian parameter kualitas lingkungan yang dikaji	30%	70%			
			% jumlah baku mutu lingkungan yang dikaji	10%	50%			

NO	FOKUS PRIORITAS /KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil Outcomes/Output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
e.	Peningkatan Instrumen Ekonomi dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup	Meningkatkan kualitas kebijakan insentif dan pendanaan lingkungan dalam pengelolaan lingkungan hidup di beberapa sektor (K/L) dan Pemda (kerjasama lintas K/L)	<p>% telaahan teknis diterima menjadi rekomendasi teknis pinjaman lunak lingkungan (90-100 proposal per tahun)</p> <p>Jumlah penerimaan program pinjaman lunak terhadap jumlah UMKM yang mengajukan permohonan pinjaman untuk melaksanakan peningkatan kualitas LH</p> <p>% Jumlah pemantauan terhadap UMKM yang telah mendapat insentif</p> <p>Jumlah pedoman dan fasilitas teknis yang terkait dengan valuasi ekonomi SDA dan LH</p> <p>Jumlah dokumen tentang bahan rumusan kebijakan insentif dan pendanaan lingkungan</p> <p>Bimbingan teknis pengembangan instrumen ekonomi dan perhitungan PDRB Hijau di daerah terpilih</p>	80%	80%	Program Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	KLH	96,5
				80%	80%			
				80%	80%			
				5	28			
				4	20			
				100%	100%			

NO	FOKUS PRIORITAS /KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil Outcomes/Output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
f.	Penanganan Kasus Lingkungan	Meningkatnya kualitas penanganan kasus lingkungan	<p>% pengaduan masyarakat yang dikelola melalui penerimaan, penelaahan dan klasifikasi, penerusan kepada pihak terkait yang berwenang, atau ditangani langsung</p> <p>% dugaan tindak pidana LH yang ditindaklanjuti melalui proses penyelidikan dan penyidikan (pulbaket) sampai proses pengadilan</p> <p>% penanganan kasus perdata LH yang ditindaklanjuti secara perdata di dalam maupun di luar pengadilan</p> <p>Jumlah kasus lingkungan yang terevaluasi dan tereksaminasi</p>	100%	100%	Program Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	KLH	89,7
				80%	100%			
				80%	100%			
				2	18			

NO	FOKUS PRIORITAS /KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil Outcomes/Output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
g	Peningkatan Kapasitas Penegakan Hukum Lingkungan	Meningkatnya kapasitas aparat penegak hukum lingkungan	Jumlah hakim lingkungan yang meningkat kapasitasnya (<i>green bench</i>)	150	550 ^{k)}	Program Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	KLH	59,8
			Jumlah kepolisian lingkungan yang meningkat kapasitasnya	66	330 ^{k)}			
			Jumlah penyidik PPNS yang meningkat kapasitasnya	100	1800 ^{k)}			
			Jumlah JPU yang meningkat kapasitasnya	66	432 ^{k)}			
			Jumlah litigator yang meningkat kapasitasnya	5	245 ^{k)}			
			Jumlah SDM pengelola pengaduan yang meningkat kapasitasnya	50	1450 ^{k)}			
			Jumlah mediator, arbiter, pihak ketiga yang meningkat kapasitasnya	99	1499 ^{k)}			
			Teroptimalisasi PPNS dan PPLH di regional	5	25 ^{k)}			
			Terlaksananya koordinasi nasional dan regional di bidang penegakan hukum lingkungan	6	30 ^{k)}			
TOTAL								1.540,0

Keterangan :

^{k)} Angka Kumulatif 5 tahun (2010-2014)

PRIORITAS BIDANG: Peningkatan Konservasi dan Rehabilitasi Sumber Daya Hutan

NO	FOKUS PRIORITAS /KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil Outcomes/Output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
1.	Perencanaan Makro Bidang Kehutanan dan Pemantapan Kawasan Hutan	Terjaminnya kepastian kawasan hutan sehingga dapat berfungsi secara optimal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data dan informasi geospasial dasar tematik kehutanan terkini tingkat nasional sebanyak 5 judul 2. Ijin pinjam pakai kawasan hutan dengan kompensasi PNPB paling tinggi 300 unit 3. Rencana makro kehutanan tentang perlindungan dan konservasi sumberdaya alam, pemanfaat, rehabilitasi hutan dan lahan dan penataan ruang sebanyak 4 judul 4. Tata batas kawasan hutan sepanjang 25.000 Km, terdiri dari batas luar dan batas fungsi kawasan hutan 5. Penunjukan kawasan hutan provinsi terselesaikan 100% 6. Keputusan Menteri Kehutanan tentang penetapan wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) dan Kesatuan Pengelolaan HUTan Lindung (KPHL) di 28 propinsi 			Perencanaan Makro Bidang Kehutanan dan Pemantapan Kawasan Hutan	Kemenhut	1.312,3

PRIORITAS BIDANG: Peningkatan Konservasi dan Rehabilitasi Sumber Daya Hutan

NO	FOKUS PRIORITAS /KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil Outcomes/Output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
a.	Pengukuhan Kawasan Hutan	Tata batas kawasan hutan serta terkendalinya perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan	Tata batas kawasan hutan sepanjang 25.000 km, terdiri dari batas luar dan batas fungsi kawasan hutan Keputusan penunjukan kawasan hutan propinsi selesai (100%) Penetapan kelompok hutan yang telah selesai tata batas temu gelang sebanyak 75% Rekomendasi tentang perubahan fungsi kawasan hutan terselesaikannya sebanyak 75% Penanganan berupa penerbitan Surat keputusan tentang pelepasan kawasan hutan terselesaikan sebanyak 75%	3.400 km	25.000 km	Perencanaan Makro Bidang Kehutanan dan Pemantapan Kawasan Hutan	Kemenuh	393,4
b.	Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)	Terwujudnya pengelolaan kawasan hutan dalam unit-unit pengelolaan, baik kawasan hutan konservasi, hutan produksi maupun hutan lindung	Penetapan wilayah kesatuan pengelolaan hutan produksi (KPHP) di 28 provinsi Penetapan wilayah kesatuan pengelolaan hutan konservasi (KPHK) di seluruh Indonesia Penetapan wilayah kesatuan pengelolaan hutan lindung (KPHL) di 28 provinsi Peraturan perundang-undangan penyelenggaraan kesatuan pengelolaan hutan (KPH) sebanyak 4 judul	4 Prov	28 Prov	Perencanaan Makro Bidang Kehutanan dan Pemantapan Kawasan Hutan	Kemenuh	189,0
				4 Prov	28 Prov			
				4 Prov	28 Prov			
				2 Judul	4 Judul			

PRIORITAS BIDANG: Peningkatan Konservasi dan Rehabilitasi Sumber Daya Hutan

NO	FOKUS PRIORITAS /KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil Outcomes/Output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
			Peta areal kerja dan peta pencadangan (IUPHHK-HT dan HA, HKm, HTR) selesai 90%.	15%	90%			
c.	Penyusunan rencana makro kawasan hutan	Perencanaan kawasan hutan secara optimal yang meliputi rencana makro kawasan hutan, penataan ruang, statistik dan pengemhangan jaringan komunikasi data kehutanan	Rencana makro kehutanan tentang perlindungan dan konservasi SDA, pemanfaatan, rehabilitasi hutan dan lahan, dan penataan ruang sebanyak 4 judul Persetujuan substansi teknis kehutanan dalam revisi RTRWP di seluruh Indonesia Bahan kebijakan perencanaan ruang, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang kawasan hutan sebanyak 3 judul dan data strategis kehutanan sebanyak 5 judul.	1 judul 50% 2 judul	4 judul 100% 8 judul	Perencanaan Makro Bidang Kehutanan dan Pemantapan Kawasan Hutan	Kemehut	298,5
d.	Inventarisasi dan pemantauan sumberdaya hutan	Data dan informasi sumber daya hutan yang meliputi :hasil inventarisasi, pemantauan, pemetaan dan pengelolaan jaringan data spasial	Data dan informasi geospasial dasar tematik kehutanan terkini tingkat nasional sebanyak 5 judul Data dan informasi potensi kayu di kawasan hutan tingkat nasional sebanyak 5 judul Data dan informasi pendugaan carbon kawasan hutan tingkat nasional sebanyak 5 judul Basis data spasial sumberdaya hutan yang terintegrasi sebanyak 5 kali update	1 judul 1 judul 1 judul 1 kali	5 judul 5 judul 5 judul 5 kali	Perencanaan Makro Bidang Kehutanan dan Pemantapan Kawasan Hutan	Kemehut	378,0

PRIORITAS BIDANG: Peningkatan Konservasi dan Rehabilitasi Sumber Daya Hutan

NO	FOKUS PRIORITAS /KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil Outcomes/Output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
e.	Pengendalian penggunaan kawasan hutan untuk pembangunan di luar kegiatan kehutanan	Terlaksananya penggunaan kawasan hutan sesuai dengan persyaratan teknis dan ketentuan yang berlaku	Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan dengan kompensasi penerimaan bukan pajak (PNBP) paling tinggi 80% dari pemohon Wajib bayar tertib membayar PNBP Penggunaan Kawasan Hutan minimal 80% Data dan informasi penggunaan kawasan hutan tersedia di 32 provinsi Peraturan perundangan untuk pengendalian dan penertiban penggunaan kawasan hutan tanpa ijin sebanyak 1 judul	16%	80%	Perencanaan Makro Bidang Kehutanan dan Pemantapan Kawasan Hutan	Kemehut	53,5
2.	Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Perlindungan Hutan	Biodiversity dan ekosistemnya berperan signifikan sebagai penyangga ketahanan ekologis dan penggerak ekonomi riil serta pengungkit martabat bangsa dalam pegaulan global	Taman nasional dan kawasan konservasi lainnya yang potensi keanekaragaman hayatinya tinggi, terdapat spesies langka dan flagship, atau mempunyai fungsi pelindung hulu sungai, dan atau memiliki potensi wisata alam signifikan, sudah dapat mandiri dalam arti mampu menghasilkan uang untuk membiayai program pengembangan konservasi			Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Perlindungan Hutan	Kemehut	4.348,2

PRIORITAS BIDANG: Peningkatan Konservasi dan Rehabilitasi Sumber Daya Hutan

NO	FOKUS PRIORITAS /KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil Outcomes/Output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
			<p>Populasi keanekaragaman hayati dan spesies yang terancam punah meningkat 3% dari kondisi tahun 2008 sesuai kondisi biologis dan kesediaan habitat</p> <p>Kasus baru tindak pidana kehutanan (illegal logging, perambahan, perdagangan tumbuhan dan satwa liar (TSL) ilegal, penambangan ilegal dan kebakaran hutan) penanganannya terselesaikan minimal 75%</p> <p>Hotspot (titik api) di pulau Kalimantan, pulau sumatera, dan pulau sulawesi berkurang 20% setiap tahun</p> <p>Meningkatnya destinasi wisata alam yang dapat berperan dalam pasara wisata nasional</p>					
a.	Pengembangan Kawasan Konservasi dan Ekosistem Esensial	Meningkatnya pengelolaan dan pendayagunaan 50 unit taman nasional dan 477 unit kawasan konservasi lainnya (CA, SM, TB, dan HL) dan ekosistem	<p>Konflik dan tekanan terhadap kawasan taman nasional dan kawasan konservasi lainnya (CA, SM, TB, dan HL) menurun sebanyak 5%</p> <p>Pengelolaan ekosistem esensial sebagai penyangga kehidupan meningkat 10%.</p>	1%	5%	Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Perlindungan	Kemenhut	1.381,3
				2%	10%			

PRIORITAS BIDANG: Peningkatan Konservasi dan Rehabilitasi Sumber Daya Hutan

NO	FOKUS PRIORITAS /KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil Outcomes/Output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
			Penanganan perambahan kawasan hutan pada 12 provinsi prioritas (Sumut, Riau, Jambi, Sumsel, Sumbar, Lampung, Kaltim, Kalteng, Kalsel, Kalbar, Sultra, dan Sulteng) Restorasi ekosistem kawasan konservasi, 1 paket per tahun	2 Prov 1 paket	12 Prov 5 paket ^{K)}			
b.	Penyidikan dan Perlindungan Hutan	Meningkatnya pengamanan kawasan hutan, hasil hutan dan jaminan terhadap hak negara atas hutan	Kasus baru tindak pidana kehutanan (illegal logging, perambahan, perdagangan TSL, illegal, penambangan illegal dan kebakaran) penanganannya terselesaikan minimal sebanyak 75% Tunggakan perkara (illegal logging, perambahan, perdagangan TSL illegal, penambangan illegal dan kebakaran) terselesaikan sebanyak 25% per tahun Kasus hukum perambahan kawasan konservasi terselesaikannya sebanyak 20%	15% 25% 4%	75% 76,30% 20%	Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Perlindungan Hutan	Kemenhut	761,2
c.	Pengembangan konservasi spesies dan genetik	Meningkatnya kualitas konservasi keanekaragaman hayati dan produk tumbuhan dan satwa liar	Populasi keanekaragaman hayati dan spesies terancam punah meningkat sebesar 3% dari kondisi tahun 2008 sesuai kondisi biologis dan kesediaan habitat Penangkaran dan pemanfaatan jenis keanekaragaman hayati secara lestari meningkat 5% Kerjasama internasional dan konvensi di bidang konservasi keanekaragaman hayati sebanyak 1 paket per tahun Penyelenggaraan skema DNS Kehutanan, 1 paket per tahun	0% 1% 1 paket 1 paket	3% 5% 5 paket ^{K)} 5 paket ^{K)}	Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Perlindungan Hutan	Kemenhut	466,0

PRIORITAS BIDANG: Peningkatan Konservasi dan Rehabilitasi Sumber Daya Hutan

NO	FOKUS PRIORITAS /KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil Outcomes/Output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
d.	Pengendalian kebakaran hutan	Meningkatkan system pencegahan pemadaman, penanggulangan, dampak kebakaran hutan dan lahan	Hotspot di Pulau Kalimantan, Pulau Sumatera, dan Pulau Sulawesi berkurang 20% setiap tahun. Luas kawasan hutan yang terbakar ditekan hingga 50% dibandingkan kondisi tahun 2008 Peningkatan kapasitas aparat pemerintah dan masyarakat dalam penanggulangan bahaya kebakaran hutan di 30 DAOPS	20% 10% 6 DAOPS	67,20% 50% 30 DAOPS	Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Perlindungan Hutan	Kemehut	1.275,0
e.	Pengembangan pemanfaatan jasa lingkungan dan wisata alam	Meningkatnya pemanfaatan jasa lingkungan dan wisata alam	Pengusahaan pariwisata alam meningkat sebesar 60% dibandingkan tahun 2008, dan jjin usaha pemanfaatan jasa lingkungan air baru sebanyak 25 unit. PNBP dibidang pengusahaan pariwisata alam meningkat 100% dibandingkan tahun 2008. Peningkatan pendapatan masyarakat di sekitar kawasan konservasi tertentu meningkat menjadi minimal Rp 800.000,00 per bulan per kepala keluarga (atau sebesar 30%) melalui upaya-upaya pemberdayaan masyarakat.	5 Unit 20% 6%	25 Unit 100% 30%	Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Perlindungan Hutan	Kemehut	464,7

PRIORITAS BIDANG: Peningkatan Konservasi dan Rehabilitasi Sumber Daya Hutan

NO	FOKUS PRIORITAS /KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil Outcomes/Output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
3.	Peningkatan Fungsi Daya Dukung DAS	Berkurangnya lahan kritis pada DAS Prioritas sehingga dapat mengurangi resiko bencana alam, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam usaha komoditas kehutanan	<p>Fasilitasi dan pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan kritis termasuk hutan mangrove, gambut dan rawa pada DAS Prioritas seluas 2,5 juta ha.</p> <p>Fasilitasi penetapan areal kerja pengelolaan hutan kemasyarakatan (HKm) seluas 2 juta ha.</p> <p>Fasilitasi pembangunan hutan rakyat untuk bahan baku industri pertukangan seluas 250.000 ha.</p> <p>Fasilitasi penetapan areal sumber benih di seluruh bioregion seluas 6.000 ha, dan pengelolaan areal sumber benih yang telah ada seluas 4.500 ha.</p>			Peningkatan Fungsi dan Daya Dukung DAS Berbasis Pemberdayaan Masyarakat	Kemenhut	9.053,8

PRIORITAS BIDANG: Peningkatan Konservasi dan Rehabilitasi Sumber Daya Hutan

NO	FOKUS PRIORITAS /KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil Outcomes/Output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
			<p>Rencana pengelolaan DAS terpadu pada 108 unit DAS prioritas.</p> <p>Fasilitasi penetapan areal kerja hutan desa seluas 500.000 ha.</p>					
a.	Penyelenggaraan Rehabilitasi Hutan dan Lahan, dan Reklamasi Hutan di DAS Prioritas	berkurangnya lahan kritis melalui rehabilitasi dan reklamasi hutan	<p>Fasilitasi dan pelaksanaan rehabilitasi hutan pada DAS prioritas seluas 800.000 ha.</p> <p>Fasilitasi rehabilitasi lahan kritis pada DAS prioritas seluas 500.000 ha.</p> <p>Fasilitasi pengembangan hutan kota seluas 5.000 ha.</p> <p>Fasilitasi rehabilitasi hutan mangrove, gambut dan rawa seluas 295.000 ha</p>	160.000 Ha	800.000 Ha	Peningkatan Fungsi dan Daya Dukung DAS Berbasis Pemberdayaan Masyarakat	Kemehut	8.222,5
			<p>Fasilitasi rehabilitasi lahan kritis pada DAS prioritas seluas 500.000 ha.</p> <p>Fasilitasi pengembangan hutan kota seluas 5.000 ha.</p> <p>Fasilitasi rehabilitasi hutan mangrove, gambut dan rawa seluas 295.000 ha</p>	100.000 Ha	500.000 Ha			
			<p>Fasilitasi pengembangan hutan kota seluas 5.000 ha.</p> <p>Fasilitasi rehabilitasi hutan mangrove, gambut dan rawa seluas 295.000 ha</p>	1.000 Ha	5.000 Ha			
			<p>Fasilitasi rehabilitasi hutan mangrove, gambut dan rawa seluas 295.000 ha</p>	60.000 Ha	295.000 Ha			
b.	Pengembangan perbenihan tanaman hutan	ketersediaan materi genetik, sumber benih, dan benih berkualitas yang memadai	<p>Areal sumber benih seluas 4.500 ha dikelola secara baik</p> <p>Fasilitasi pembangunan areal sumber benih seluas 6.000 ha</p> <p>Pengembangan Seed for People 1 paket per tahun</p> <p>Pengembangan sentra bibit 1 paket/tahun</p>	4.500 Ha	4.500 Ha	Peningkatan Fungsi dan Daya Dukung DAS Berbasis Pemberdayaan Masyarakat	Kemehut	109,5
			<p>Fasilitasi pembangunan areal sumber benih seluas 6.000 ha</p> <p>Pengembangan Seed for People 1 paket per tahun</p> <p>Pengembangan sentra bibit 1 paket/tahun</p>	1.200 Ha	6.000 Ha			
			<p>Pengembangan Seed for People 1 paket per tahun</p> <p>Pengembangan sentra bibit 1 paket/tahun</p>	1 paket	5 paket ^{K)}			
			<p>Pengembangan sentra bibit 1 paket/tahun</p>	1 paket	5 paket ^{K)}			
c.	Pembinaan penyelenggaraan pengelolaan DAS	Terselenggaranya pengelolaan DAS secara terpadu pada DAS prioritas	<p>Rencana pengelolaan DAS terpadu di 108 DAS prioritas</p> <p>Terbangunnya base line data pengelolaan DAS di 36 BPDAS</p> <p>Tersedianya data dan peta lahan kritis di 36 BPDAS</p>	22 DAS	108 DAS	Peningkatan Fungsi dan Daya Dukung DAS Berbasis Pemberdayaan Masyarakat	Kemehut	721,9
			<p>Rencana pengelolaan DAS terpadu di 108 DAS prioritas</p> <p>Terbangunnya base line data pengelolaan DAS di 36 BPDAS</p> <p>Tersedianya data dan peta lahan kritis di 36 BPDAS</p>	7 BPDAS	36 BPDAS			
			<p>Terbangunnya base line data pengelolaan DAS di 36 BPDAS</p> <p>Tersedianya data dan peta lahan kritis di 36 BPDAS</p>	7 BPDAS	36 BPDAS			

PRIORITAS BIDANG: Peningkatan Konservasi dan Rehabilitasi Sumber Daya Hutan

NO	FOKUS PRIORITAS /KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil Outcomes/Output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
4.	Pengembangan Penelitian dan IPTEK Sektor Kehutanan	Minimal 60% hasil penelitian dan pengembangan kehutanan dapat dimanfaatkan dalam pengambilan kebijakan, pengelolaan teknis kehutanan dan pengayaan ilmu pengetahuan, termasuk pengembangan kebijakan dan teknis yang berkaitan dengan isu-isu perubahan iklim	<p>Iptek dasar dan terapan yang dimanfaatkan oleh pengguna untuk bidang hutan alam, biodiversitas dan pengelolaan DAS sebanyak 7 judul</p> <p>Iptek dasar dan terapan yang dimanfaatkan oleh pengguna bidang hutan tanaman dan HHHK sebanyak 6 judul</p> <p>Iptek dasar dan terapan yang dimanfaatkan oleh pengguna bidang pengolahan hasil hutan sebanyak 5 judul</p> <p>Iptek dasar dan terapan yang dimanfaatkan oleh pengguna bidang lansekap hutan, perubahan iklim dan kebijakan kehutanan sebanyak 7 judul</p>			Penelitian dan Pengembangan Departemen Kehutanan	Kemenuh	233,6
a.	Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Kehutanan dan Perubahan Iklim.	Ketersediaan dan termanfaatkan iptek dasar dan terapan bidang lansekap hutan, adaptasi dan mitigas perubahan iklim, dan kebijakan kehutanan	Iptek dasar dan terapan yang dihasilkan pada bidang lansekap hutan, perubahan iklim dan kebijakan kehutanan sebanyak 7 judul	20%	100%	Penelitian dan Pengembangan Departemen Kehutanan	Kemenuh	113,4

PRIORITAS BIDANG: Peningkatan Konservasi dan Rehabilitasi Sumber Daya Hutan

NO	FOKUS PRIORITAS /KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil Outcomes/Output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
			Iptek dasar dan terapan yang dimanfaatkan oleh pengguna pada bidang lansekap hutan, perubahan iklim dan kebijakan kehutanan sebanyak 7 judul.	20%	100%			
b.	Penelitian dan Pengembangan Konservasi dan Rehabilitasi Sumberdaya Alam.	Tersedia dan termanfaatkannya Iptek dasar dan terapan konservasi dan rehabilitasi sumberdaya alam	Iptek dasar dan terapan yang dihasilkan bidang hutan alam, biodiversitas dan pengelolaan DAS, 7 judul. Iptek dasar dan terapan yang dimanfaatkan oleh pengguna bidang hutan alam, biodiversitas dan pengelolaan DAS sebanyak 7 judul.	20%	100%	Penelitian dan Pengembangan Departemen Kehutanan	Kemenhut	120,2
TOTAL								14.947,9

Keterangan :

^{k)} Angka Kumulatif 5 tahun (2010-2014)

PRIORITAS BIDANG: Peningkatan Pengelolaam Sumber Daya Kelautan

NO	FOKUS PRIORITAS /KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil Outcomes/Output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
1	Peningkatan Rehabilitasi, Konservasi, Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Meningkatnya tingkat ketaatan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan Meningkatnya luas kawasan konservasi laut	Tingkat ketaatan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan Luas kawasan konservasi laut					3.250,2
a	Peningkatan Operasional Pengawasan Sumber Daya Perikanan	Meningkatnya usaha perikanan yang sesuai ketentuan	Jumlah <i>usaha</i> penangkapan ikan di wilayah bagian barat yang sesuai ketentuan (Kapal) Jumlah usaha penangkapan ikan di wilayah bagian timur yang sesuai ketentuan	280 kapal 180 kapal	2.680 kapal 1.712 kapal	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	KKP	170,1
b	Peningkatan Operasional Pengawasan Sumber Daya Kelautan	Meningkatnya wilayah perairan Indonesia yang bebas kegiatan <i>illegal</i> dan merusak	Jumlah wilayah perairan yang bebas kegiatan perusakan ekosistem perairan Jumlah wilayah perairan yang bebas kegiatan pencemaran	4 wilayah 7 wilayah perairan	27 wilayah 40 wilayah perairan	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	KKP	87,0
c	Peningkatan Operasional dan Pemeliharaan Kapal Pengawas	Meningkatnya wilayah pengelolaan perikanan bebas <i>IUU fishing</i>	Jumlah wilayah pengelolaan perikanan bagian barat bebas <i>IUU Fishing</i> Jumlah wilayah pengelolaan perikanan bagian timur bebas <i>IUU Fishing</i>	3 WPP 6 WPP	5 WPP 6 WPP	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	KKP	1.617,3

PRIORITAS BIDANG: Peningkatan Pengelolaam Sumber Daya Kelautan

NO	FOKUS PRIORITAS /KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil Outcomes/Output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
d	Pengembangan Sarana dan Prasarana Pengawasan dan Pemantuan Kapal Perikanan	Terpenuhinya sarana dan prasarana pengawasan dengan rancang bangun dan sistem pemantauan yang terintegrasi dan tepat sasaran	Jumlah pemenuhan sarana pengawasan yang memadai secara terintegrasi, akuntabel dan tepat waktu -Kapal Pengawas -Speedboat -Stasiun Radar Satelit -Transmitter VMS Pemenuhan prasarana pengawasan yang memadai secara terintegrasi, akuntabel dan tepat waktu -Kantor dan Bangunan Pengawas -Dermaga -Pos Pengawas	0 15 0 0 5 2 15	55 ₪ 137 ₪ 0 ₪ 1 ₪ 30 ₪ 27 ₪ 70 ₪	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	KKP	536,9
e	Penyelesaian Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan	Meningkatnya pelaku tindak pidana kelautan dan perikanan yang divonis secara akuntabel dan tepat waktu serta persentase penurunan tindak pidana kelautan dan perikanan	Jumlah kapal yang diperiksa	4000	40164 ₪	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	KKP	93,5

PRIORITAS BIDANG: Peningkatan Pengelolaam Sumber Daya Kelautan

NO	FOKUS PRIORITAS /KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil Outcomes/Output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
f	Pengelolaan dan Pengembangan Konservasi Kawasan dan Jenis	Terkelolanya 20% kawasan ekosistem terumbu karang, lamun, mangrove dan 15 jenis biota perairan yang terancam punah	kawasan konservasi laut dan kawasan konservasi perairan tawar dan payau yang dikelola secara berkelanjutan seluas 4,5 juta ha Jumlah kawasan konservasi dan jenis biota perairan dilindungi yang diidentifikasi dan dipetakan secara akurat.	900 ribu ha 9 Kawasan dan 3 jenis	4,5 juta ha ^{ki} 9 Kawasan dan 3 jenis	Program Pengelolaan Sumber Daya Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	KKP	745,5
2	Pendayagunaan Laut, Pesisir, Pulau-Pulau Kecil, dan Pulau-Pulau Terdepan	Integrasi pengelolaan wilayah laut, pesisir, pulau-pulau kecil Peningkatan pengelolaan pulau-pulau terdepan Adaptasi dan mitigasi bencana di wilayah pesisir, pulau-pulau kecil Penataan wilayah pesisir	Terintegrasinya pengelolaan wilayah laut, pesisir, pulau-pulau kecil Terkelolanya pulau-pulau terdepan Tingkat implementasi adaptasi dan mitigasi bencana di wilayah pesisir, pulau-pulau kecil Tertatanya wilayah pesisir					2.831,4
a	Penataan Ruang dan Perencanaan Pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Tersedianya 145 rencana zonasi nasional/ provinsi/ kabupaten/ kota, 50 masterplan minapolitan, 30 masterplan kluster pulau-pulau kecil bernilai ekonomi tinggi serta 12 master plan kawasan sentra produksi kelautan	Jumlah kawasan laut dan pesisir yang memiliki peta potensi dan arahan pemanfaatan yang terintegrasi, akuntabel dan terkini Jumlah kawasan pulau-pulau kecil yang memiliki peta potensi dan arahan pemanfaatan yang terintegrasi, akuntabel dan terkini	6 kawasan 23 kawasan	50 kawasan ^{ki} 145 kawasan ^{ki}	Program Pengelolaan Sumber Daya Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	KKP	481,1

PRIORITAS BIDANG: Peningkatan Pengelolaam Sumber Daya Kelautan

NO	FOKUS PRIORITAS /KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil Outcomes/Output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
b	Pendayagunaan Pesisir dan Lautan	Terkelolanya 50 Kawasan minapolitan yang tahan terhadap ancaman kerusakan dan mempunyai infrastruktur dasar, serta 3 produk kelautan	Jumlah luasan kawasan pesisir rusak yang pulih kembali. Jumlah ragam dan volume produk kelautan yang dikembangkan pada kawasan pesisir dan lautan. - BMKT - Garam - Deep sea water	60 ha	5.000 ha ^{K)}	Program Pengelolaan Sumber Daya Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	KKP	404,5
c	Pendayagunaan Pulau-Pulau Kecil	Terwujudnya 200 pulau kecil yang memiliki infrastruktur mamadai, ekosistem baik, siap terhadap bencana, dan 25 di antaranya terinvestasi	Jumlah pulau kecil yang diidentifikasi dan dipetakan potensinya secara akurat termasuk pulau-pulau kecil terluar Jumlah pulau kecil yang memiliki infrastuktur memadai secara terintegrasi termasuk pulau-pulau kecil terluar	20 pulau	205 pulau ^{K)}	Program Pengelolaan Sumber Daya Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	KKP	578,6
d	Pelayanan Usaha dan Pemberdayaan Masyarakat	Meningkatnya keberdayaan dan kemandirian 2 juta usaha skala mikro di seluruh kawasan minapolitan pesisir, beroperasinya sarana usaha mikro di 300 kabupaten/kota pesisir	Jumlah kelompok usaha mikro di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang <i>bankable</i> . - Pengembangan sarana usaha Mikro LKM - Dana Pemberdayaan Masyarakat Desa/PNPM MK - Tenaga pendamping - Kelompok Usaha Mikro	100 unit 120 kab/kota	100 unit 120 kab/kota	Program Pengelolaan Sumber Daya Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	KKP	1.300,7

PRIORITAS BIDANG: Peningkatan Pengelolaam Sumber Daya Kelautan

NO	FOKUS PRIORITAS /KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil Outcomes/Output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
e	Pembinaan dan koordinasi penyiapan produk hukum dan penataan organisasi KKP	Terselenggaranya pemenuhan peraturan perundang-undangan serta organisasi dan tata laksana	Persentase pemenuhan peraturan perundang-undangan serta efektivitas dan kemitakhiran hukum laut, perjanjian, perizinan, organisasi dan tata laksana sesuai kebutuhan nasional dan tantangan global, serat pelayanan bantuan hukum yang akuntabel	50%	90%	Program Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KKP	KKP	66,5
3	Inovasi Riset dan Teknologi Terapan Kelautan	Dimanfaatkannya hasil penelitian dan pengembangan Iptek KP	Pengembangan Iptek dasar dan aplikasi Iptek terapan					951,9
a	Penelitian dan Pengembangan IPTEK Kelautan	Rekomendasi dan inovasi teknologi perlindungan pantai, energi terbarukan, pengawasan, eksplorasi, eksploitasi, instrumentasi kelautan, maritim, instrumentasi kelautan, maritim, mitigasi/adaptasi bencana dan perubahan iklim yang meningkatkan efisiensi pengelolaan sumber daya kelautan	Jumlah rekomendasi dan inovasi teknologi perlindungan, pengawasan, eksplorasi, eksploitasi, instrumentasi kelautan, maritim, mitigasi/adaptasi bencana dan perubahan iklim yang meningkatkan efisiensi pengelolaan sumber daya kelautan secara berkelanjutan	2 9	10 ^κ 45 ^κ	Program Penelitian dan Pengembangan IPTEK Kelautan dan Perikanan	KKP	242,8
b	Penelitian dan Pengembangan IPTEK Kewilayahan, Dinamika dan Sumber Daya Nonhayati Pesisir dan Laut	Wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil yang teridentifikasi potensi, karakteristik, kebutuhan konservasi SDNHL dan fenomena alamnya serta jumlah rekomendasi pengelolaan dan model pemanfaatannya.	Jumlah rekomendasi pengelolaan dan model pemanfaatannya, serta Jumlah paket data terkait dengan fenomena alam dan sumber daya non hayati di wilayah pesisir ,laut, serta pulau-pulau kecil	Rekomendasi dan/atau model pemanfaatan: 3	Rekomendasi ^κ dan/atau model pemanfaatan: 15	Program Penelitian dan Pengembangan IPTEK Kelautan dan Perikanan	KKP	260,7

PRIORITAS BIDANG: Peningkatan Pengelolaam Sumber Daya Kelautan

NO	FOKUS PRIORITAS /KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil Outcomes/Output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
				1 paket data terkait fenomena alam laut, 5 paket data terkait SDNH, pesisir, dan laut	5 paket data ^{K)} terkait fenomena alam laut, 25 paket data terkait SDNH, pesisir, dan laut			
c	Penelitian dan Pengembangan IPTEK Pengolahan Produk dan Bioteknologi Kelautan dan Perikanan	HKI, rekomendasi serta inovasi teknologi dan bioteknologi yang meningkatkan efisiensi pengolahan secara optimal, ragam, nilai tambah, kualitas dan keamanan produk unggulan/ prospektif.	Jumlah HKI, rekomendasi serta inovasi teknologi dan bioteknologi yang meningkatkan efisiensi pengolahan secara optimal, ragam, nilai tambah, kualitas dan keamanan produk unggulan/ prospektif.	Paket Teknologi: 3	HKI : 2; Paket ^{K)} Teknologi: 16	Program Penelitian dan Pengembangan IPTEK Kelautan dan Perikanan	KKP	242,0
d	Penelitian dan Perekayasaan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan	Rekomendasi pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan berkelanjutan dan model pengembangan usaha dan pemasaran berbasis minapolitan.	Jumlah rekomendasi pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan berkelanjutan dan model pengembangan usaha dan pemasaran berbasis minapolitan	Rekomendasi: 4 bh Model pengembangan: 4 bh	Rekomendasi: ^{K)} 20 bh Model ^{K)} pengembangan: 20bh	Program Penelitian dan Pengembangan IPTEK Kelautan dan Perikanan	KKP	206,3
TOTAL								7.033,5

Keterangan :

^{K)} Angka Kumulatif 5 tahun (2010-2014)

PRIORITAS BIDANG: Peningkatan Kualitas Informasi Iklim dan Bencana Alam serta Kapasitas Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim

NO	FOKUS PRIORITAS /KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil Outcomes/Output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
1.	Peningkatan Kualitas Informasi Iklim, Cuaca dan Bencana Alam Lainnya	Meningkatnya kapasitas pelayanan serta ketersediaan data dan informasi iklim, cuaca dan bencana alam lainnya yang cepat dan akurat						2.070,1
a.	Pengelolaan Meteorologi Publik BMKG	Meningkatnya pelayanan data dan informasi meteorologi publik serta peringatan dini cuaca ekstrem	<p>Persentase tingkat kemampuan pelayanan data dan informasi meteorologi publik</p> <p>Persentase tingkat kemampuan pelayanan data dan informasi potensi kebakaran hutan</p> <p>Persentase tingkat kemampuan pelayanan data dan informasi cuaca ekstrem</p>	<p>50%</p> <p>50%</p> <p>50%</p>	<p>80%</p> <p>80%</p> <p>80%</p>	Pengembangan dan Pembinaan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika	BMKG	899,7

PRIORITAS BIDANG: Peningkatan Kualitas Informasi Iklim dan Bencana Alam serta Kapasitas Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim

NO	FOKUS PRIORITAS /KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil Outcomes/Output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
b.	Pengelolaan Iklim Agroklimat dan Iklim Maritim BMKG	Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan data dan informasi di bidang iklim agroklimat dan iklim maritim	Jumlah pelayanan informasi iklim agroklimat dan iklim maritim Persentase pengguna informasi iklim agroklimat dan iklim maritim	75% 75%	95% 90%	Pengembangan dan Pembinaan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika	BMKG	151,6
c.	Pengelolaan Gempa Bumi dan Tsunami BMKG	Tersedianya kebijakan teknis dalam penanganan penyediaan informasi gempa bumi dan tsunami	Kesinambungan (sustainabilitas) Ina-TEWS Kesinambungan sistem pengamatan di bidang gempabumi dan tsunami Kesinambungan sistem analisa data di bidang gempabumi dan tsunami	100% 90% 90%	100% 90% 90%	Pengembangan dan Pembinaan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika	BMKG	515,0

PRIORITAS BIDANG: Peningkatan Kualitas Informasi Iklim dan Bencana Alam serta Kapasitas Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim

NO	FOKUS PRIORITAS /KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil Outcomes/Output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
d.	Pengelolaan Perubahan Iklim dan Kualitas Udara BMKG	Tersedianya pelayanan data dan informasi di bidang perubahan iklim dan kualitas udara, serta kerjasama di tingkat nasional dan internasional terkait kegiatan di bidang perubahan iklim dan kualitas udara	Jumlah pelayanan informasi perubahan iklim dan kualitas udara Persentase pengguna informasi perubahan iklim dan kualitas udara	70% 65%	90% 90%	Pengembangan dan Pembinaan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika	BMKG	46,0
e.	Pengelolaan Meteorologi Penerbangan dan Maritim BMKG	Meningkatnya kualitas, kuantitas dan jangkauan pelayanan data, informasi dan jasa di bidang meteorologi penerbangan dan maritim	Persentase tingkat kemampuan Pelayanan data dan informasi meteorologi maritim Persentase Tingkat Kemampuan Pelayanan Data dan Informasi Meteorologi Penerbangan Frekuensi Pelayanan Informasi Meteorologi Maritim Ketersediaan data meteorologi	40% 40% 365 680	85% 85% 1460 890	Pengembangan dan Pembinaan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika	BMKG	395,4

PRIORITAS BIDANG: Peningkatan Kualitas Informasi Iklim dan Bencana Alam serta Kapasitas Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim

NO	FOKUS PRIORITAS /KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil Outcomes/Output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
f.	Pengelolaan Seismologi Teknik, Geofisika Potensial dan Tanda Waktu BMKG	Tersedianya sarana dan prasarana untuk pengelolaan data dan informasi bidang seismologi teknik, geofisika potensial dan tanda waktu	Tersedianya peralatan pengamatan seismoteknik, geopotensial dan tanda waktu Kesinambungan (sustainabilitas) sistem pengamatan, analisa, dan pelayanan dalam bidang seismoteknik, geopotensial, dan tanda waktu Tersedianya data dan informasi dalam bentuk peta secara kumulatif dan bulletin di bidang seismoteknik, geopotensial, dan tanda waktu	40 90% 90%	300 ^{K)} 90% 90%	Pengembangan dan Pembinaan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika	BMKG	62,5
2.	Peningkatan Adaptasi dan mitigasi terhadap Perubahan Iklim	Meningkatnya kemampuan adaptasi dan mitigasi para pihak dalam menghadapi dampak perubahan iklim						652,7

PRIORITAS BIDANG: Peningkatan Kualitas Informasi Iklim dan Bencana Alam serta Kapasitas Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim

NO	FOKUS PRIORITAS /KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil Outcomes/Output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
a.	Pengendalian Pencemaran Udara	Menurunnya beban pencemar udara dari industri yang dipantau dan diawasi	Jumlah industri pertambangan, energi dan migas yang dipantau dan diawasi	200	220	Program Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	KLH	120,8
			Jumlah agroindustri yang dipantau dan diawasi	220	245			
			Jumlah industri manufaktur yang dipantau dan diawasi	260	330			
			Jumlah industri yang taat terhadap peraturan LH	480	720			
			Jumlah penurunan beban pencemar udara dari industri yang dipantau dan diawasi	2,5%	12,5% ^{K)}			
			Jumlah pedoman teknis/peraturan perundang-undangan	2	26 ^{K)}			

PRIORITAS BIDANG: Peningkatan Kualitas Informasi Iklim dan Bencana Alam serta Kapasitas Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim

NO	FOKUS PRIORITAS /KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil Outcomes/Output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
b.	Pengendalian Pencemaran Udara Dari Emisi dan Kebisingan Kendaraan Bermotor	Menurunnya emisi dan kebisingan dari kendaraan di prioritas kota-kota yang dipantau	Jumlah peraturan perundangan yang ditetapkan	2	37 ^{K)}	Program Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	KLH	104,8
			Jumlah daerah (provinsi/kota) yang difasilitasi dalam penyusunan Peraturan Daerah tentang pengendalian pencemaran udara khususnya sumber bergerak	4	36 ^{K)}			
			Jumlah kota yang difasilitasi dalam penerapan pemeriksaan emisi dan perawatan kendaraan bermotor (P&P)	4	36 ^{K)}			

PRIORITAS BIDANG: Peningkatan Kualitas Informasi Iklim dan Bencana Alam serta Kapasitas Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim

NO	FOKUS PRIORITAS /KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil Outcomes/Output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
			Jumlah kebijakan sektor yang difasilitasi dalam mendukung reduksi emisi (penetapan standar emisi dan kebisingan, bahan bakar, manajemen transportasi, kendaraan tidak bermotor (NMT), uji emisi bagi kendaraan pribadi, <i>land use planning</i>)	2	10 ^{k)}			
			Jumlah kota yang dievaluasi kualitas udaranya	16	36			
			Jumlah pembinaan teknis dalam pengendalian pencemaran sumber bergerak	5	25 ^{k)}			

PRIORITAS BIDANG: Peningkatan Kualitas Informasi Iklim dan Bencana Alam serta Kapasitas Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim

NO	FOKUS PRIORITAS /KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil Outcomes/Output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
c.	Perlindungan Atmosfir dan Pengendalian Dampak Perubahan Iklim	Tersedianya perangkat kebijakan dan terlaksananya kegiatan untuk melindungi fungsi atmosfer & mengendalikan dampak perubahan iklim	Jumlah konsep kebijakan di bidang perlindungan atmosfer dan pengendalian dampak perubahan iklim % penyiapan penyusunan perangkat untuk sektor yang akan mendapatkan bimbingan teknis untuk melakukan inventori GRK & BPO Jumlah sektor yang mendapatkan bimbingan teknis untuk melakukan inventori GRK & BPO % penetapan baseline untuk pengurangan konsumsi Bahan Perusak Ozon (BPO) - HCFC % pengurangan konsumsi Bahan Perusak Ozon (BPO) - HCFC	3 100% - 100% -	17 ^{k)} 100% 6 100% 10%	Program Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	KLH	112,1

PRIORITAS BIDANG: Peningkatan Kualitas Informasi Iklim dan Bencana Alam serta Kapasitas Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim

NO	FOKUS PRIORITAS /KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil Outcomes/Output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
			Jumlah pemerintah daerah provinsi yang dilakukan pembinaan teknis untuk kajian kerentanan dan adaptasi perubahan iklim	3	11			
			Jumlah sektor dan daerah yang mendapatkan bimbingan teknis untuk melakukan kegiatan perlindungan atmosfer dan pengendalian dampak perubahan iklim	5	50 ^{K)}			
			Implementasi konsep Program Kampung Iklim	2	22 ^{K)}			
d.	Peningkatan Konservasi dan Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan	Meningkatnya kualitas kebijakan konservasi dan pengendalian kerusakan hutan dan lahan, yang terpadu dan bersifat lintas K/L, antara lain dengan Kemenhut, Kemen.PU, BPN, Pemda	Jumlah kebijakan konservasi dan pengendalian kerusakan hutan dan lahan yang ditetapkan/ diterbitkan (kriteria dan pedoman), yang terkoordinasi antara K/L dan daerah Data sebaran hotspot di 8 Provinsi rawan kebakaran hutan dan lahan, yang terkoordinasi antara K/L dan daerah	3 80%	15 ^{K)} 80%	Program Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	KLH	143,3

PRIORITAS BIDANG: Peningkatan Kualitas Informasi Iklim dan Bencana Alam serta Kapasitas Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim

NO	FOKUS PRIORITAS /KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil Outcomes/Output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
			Diterapkannya mekanisme pencegahan kebakaran hutan dan lahan di 8 Provinsi rawan kebakaran hutan dan lahan, yang terkoordinasi antara K/L dan daerah	8	8			
			Data kondisi kerusakan hutan dan lahan pada 11 DAS prioritas dan berpotensi rawan longsor, yang terkoordinasi antara K/L dan daerah	80%	80%			
			Data tutupan lahan dan perubahan penggunaan lahan <i>Land Use Change</i> melalui Program Menuju Indonesia Hijau	100%	100%			
			Jumlah provinsi (pendekatan ekosistem) yang dipantau sesuai data potensi dan kejadian bencana	10	30			
			% rekomendasi yang diimplementasikan daerah dari jumlah propinsi yang dipantau setiap tahunnya	50%	50%			

PRIORITAS BIDANG: Peningkatan Kualitas Informasi Iklim dan Bencana Alam serta Kapasitas Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim

NO	FOKUS PRIORITAS /KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil Outcomes/Output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
e.	Peningkatan Konservasi dan Pengendalian Kerusakan Ekosistem Pesisir dan Laut	Meningkatnya kualitas kebijakan konservasi dan pengendalian kerusakan ekosistem pesisir dan laut	Jumlah kajian, rekomendasi, dan kebijakan peningkatan konservasi dan pengendalian kerusakan pesisir dan laut yang ditetapkan (per tahun)	3	19 ^{K)}	Program Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	KLH	75,9
			% capaian inventarisasi data kerusakan ekosistem pesisir dan laut dengan basis jumlah kabupaten yang memiliki pesisir	10%	50%			
			Jumlah daerah yang diverifikasi tingkat kerusakan ekosistem dan kualitas lingkungan (per tahun)	5	41 ^{K)}			
			Jumlah model implementasi kebijakan di regional	5	25 ^{K)}			

PRIORITAS BIDANG: Peningkatan Kualitas Informasi Iklim dan Bencana Alam serta Kapasitas Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim

NO	FOKUS PRIORITAS /KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil Outcomes/Output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
f.	Pengawasan dan Evaluasi Pemanfaatan Ruang	Terlaksananya pengawasan pemanfaatan ruang dan evaluasi pemanfaatan ruang berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan, yang terpadu dan bersifat lintas K/L	<p>% penyelesaian dokumen konsep, naskah akademis, pedoman dan peraturan perundang-undangan berkaitan dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan [dari 12 dokumen yang direncanakan] yang terkoordinasi antar K/L</p> <p>% penyelesaian dokumen pedoman kebijakan pengawasan pemanfaatan ruang berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan [dari 5 dokumen yang direncanakan] yang terkoordinasi antark K/L</p> <p>% penyelesaian kajian daya dukung 4 pulau besar yang terkoordinasi antar K/L</p>	16,7%	100%	Program Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	KLH	95,7

PRIORITAS BIDANG: Peningkatan Kualitas Informasi Iklim dan Bencana Alam serta Kapasitas Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim

NO	FOKUS PRIORITAS /KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil Outcomes/Output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
			% penyelesaian kajian penyimpangan pemanfaatan ruang dan dampaknya terhadap lingkungan kerusakan dan bencana [dari 20 lokasi yang direncanakan] dan didiseminasi kepada K/L dan daerah terkait	0	100%			
			% penerapan instrumen daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dalam perencanaan ruang dan evaluasi pemanfaatan ruang di kabupaten dan propinsi [dari 11 kabupaten dan 4 propinsi yang direncanakan] yang terkoordinasi antar K/L dan daerah	6,70%	100,00%			
			% penerapan instrumen daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup di wilayah ekoregion yang terkoordinasi antar K/L dan daerah	0	100%			

PRIORITAS BIDANG: Peningkatan Kualitas Informasi Iklim dan Bencana Alam serta Kapasitas Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim

NO	FOKUS PRIORITAS /KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil Outcomes/Output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
			Jumlah propinsi dilaksanakannya pengawasan dan evaluasi pemanfaatan ruang dan alih fungsi lahan/ruang dan pelaksanaan instrumen pengawasan pemanfaatan ruang di kawasan lahan gambut, hutan dan DAS prioritas untuk menunjang pencapaian Prioritas Nasional 9 RPJMN 2010-2014	2	33			
			% PPLHD yang ditingkatkan kapasitasnya dalam pengawasan pemanfaatan ruang [dari 250 orang PPLHD yang direncanakan]	10%	100%			
3.	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penanganan Perubahan Iklim	Menguatnya kapasitas institusi dalam mengantisipasi dan menangani dampak perubahan iklim		10%	100%			1.506,6

PRIORITAS BIDANG: Peningkatan Kualitas Informasi Iklim dan Bencana Alam serta Kapasitas Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim

NO	FOKUS PRIORITAS /KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil Outcomes/Output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
a.	Pengelolaan Instrumentasi, Rekayasa dan Kalibrasi BMKG	Tersedianya kebijakan teknis bidang instrumentasi, rekayasa dan kalibrasi	Jumlah kebijakan teknis instrumentasi, rekayasa dan kalibrasi yang disusun Persentase informasi pengelolaan instrumentasi, rekayasa dan kalibrasi secara maksimal	17 10%	107 ^{K)} 30%	Pengembangan dan Pembinaan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika	BMKG	172,9
b.	Pengelolaan Jaringan Komunikasi BMKG	Tersedianya kebijakan teknis bidang jaringan komunikasi	Jumlah kebijakan teknis jaringan komunikasi yang disusun Persentase informasi pengelolaan jaringan komunikasi	63% 90%	100% 90%	Pengembangan dan Pembinaan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika	BMKG	127,9
c.	Pengelolaan Data Base BMKG	Tersedianya mekanisme yang mengatur ketersediaan dan pengelolaan database	Jumlah kebijakan database yang disusun Persentase informasi pengelolaan database secara maksimal	11 20%	86 ^{K)} 100%	Pengembangan dan Pembinaan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika	BMKG	68,0

PRIORITAS BIDANG: Peningkatan Kualitas Informasi Iklim dan Bencana Alam serta Kapasitas Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim

NO	FOKUS PRIORITAS /KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil Outcomes/Output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
d.	Pengembangan UPT BMKG	Terbinanya pelaksanaan UPT BMKG	Persentase Pembinaan dan pengembangan UPT BMKG seluruh Indonesia	80%	90%	Pengembangan dan Pembinaan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika	BMKG	688,7
e.	Penelitian dan Pengembangan BMKG	Terselenggaranya penelitian dan pengembangan bidang meteorologi, klimatologi, kualitas udara dan geofisika	Jumlah penelitian dan pengembangan bidang meteorologi	0	75 ^{K)}	Program Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya	BMKG	81,7
		Jumlah penelitian dan pengembangan bidang klimatologi	0	40 ^{K)}				
		Jumlah penelitian dan pengembangan bidang kualitas udara	0	16 ^{K)}				
		Jumlah penelitian dan pengembangan bidang geofisika	0	92 ^{K)}				
		Jumlah penelitian dan pengembangan yang digunakan dalam operasional	0	51 ^{K)}				
		Jumlah penelitian dan pengembangan yang di publikasikan	0	30 ^{K)}				

PRIORITAS BIDANG: Peningkatan Kualitas Informasi Iklim dan Bencana Alam serta Kapasitas Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim

NO	FOKUS PRIORITAS /KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil Outcomes/Output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
			Jumlah kerjasama penelitian dan pengembangan	0	34 ^{k)}			
f.	Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya Lahan Pertanian	Tersedianya data, informasi dan peningkatan inovasi teknologi pengelolaan sumberdaya lahan pertanian	Tersedianya peta potensi sumberdaya lahan pertanian	2,5 juta ha di Sulawesi dan daerah lainnya	15,5 juta ha	Program Penciptaan Teknologi Dan Varietas Unggul Berdaya Saing	Kementan	295,1
			Jumlah informasi, paket komponen teknologi pengelolaan SDL (tanah, air, perubahan iklim, pupuk dan lingkungan pertanian)	12 paket	11 paket			
TOTAL								4.229,4

Keterangan :

^{k)} Angka Kumulatif 5 tahun (2010-2014)



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2010
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH NASIONAL
(RPJMN)
TAHUN 2010--2014**

**BUKU II
MEMPERKUAT SINERGI ANTARBIDANG PEMBANGUNAN**

**BAB XI
SISTEM PENDUKUNG MANAJEMEN PEMBANGUNAN NASIONAL**

**Diperbanyak Oleh:
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS)
2010**



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
BAB XI SISTEM PENDUKUNG MANAJEMEN	
PEMBANGUNAN NASIONAL	II.11-1
11.1 Kondisi Umum	II.11-1
11.2 Permasalahan dan Sasaran Pembangunan	II.11-9
11.2.1 Permasalahan	II.11-9
11.2.2 Sasaran	II.11-13
11.3 Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan	II.11-13
11.3.1 Penguatan Perencanaan Pembangunan.....	II.11-15
11.3.2 Perkuatan Data dan Statistik.....	II.11-16
11.3.3 Perkuatan Pengadaan Barang dan Jasa Publik.....	II.11-17



BAB XI

SISTEM PENDUKUNG MANAJEMEN PEMBANGUNAN NASIONAL

Sistem pendukung manajemen pembangunan nasional merupakan suatu perangkat institusi yang bekerja sejak perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi kinerja guna mendukung keberhasilan pembangunan nasional. Dalam bab ini hanya dibahas tiga komponen utama sistem pendukung manajemen pembangunan nasional, yaitu perencanaan pembangunan, data dan statistik, serta pengadaan barang dan jasa.

11.1 Kondisi Umum

Perencanaan merupakan pijakan awal untuk menentukan arah pembangunan nasional melalui penetapan kebijakan dan program yang tepat serta dengan mengoptimalkan sumber daya dan melibatkan pelaku pembangunan nasional. Bagi bangsa Indonesia, perencanaan pembangunan memiliki itu tujuan yang sangat strategis dan vital yaitu untuk menentukan arah perjalanan kehidupan bangsa ke depan. Setidaknya terdapat lima argumentasi yang mendasarinya. *Pertama*, dalam jangka panjang perencanaan pembangunan nasional sangat dibutuhkan sebagai salah satu instrumen untuk mencapai tujuan kehidupan berbangsa dan bernegara. *Kedua*, dalam jangka yang lebih pendek perencanaan pembangunan sangat dibutuhkan untuk mengatasi berbagai permasalahan penting dan mendesak seperti kemiskinan, pengangguran, kualitas pendidikan dan kesehatan yang masih rendah, konflik sosial di berbagai wilayah, kesenjangan pertumbuhan ekonomi antar daerah dan kawasan, serta permasalahan sosial, ekonomi, politik, dan lain-lain. *Ketiga*, dalam era globalisasi perencanaan pembangunan sangat diperlukan untuk menyusun arahan strategis bagi kegiatan pembangunan dalam rangka mengantisipasi perkembangan dunia yang cepat berubah dan situasi/kondisi Indonesia di masa datang dalam berbagai aspek sosial, ekonomi, demografi, dan sebagainya. *Keempat*, ketersediaan sumber daya yang dimiliki oleh Pemerintah untuk melaksanakan pembangunan sangat terbatas sehingga perencanaan sangat diperlukan untuk menentukan prioritas pembangunan yang diperlukan, menentukan tujuan dan sasaran kinerja yang hendak dicapai, serta mengalokasikan sumber daya (anggaran, SDM, dan lainnya) secara tepat, efektif, efisien, realistis, dan konsisten. *Kelima*, dalam era desentralisasi perencanaan pembangunan nasional secara strategis semakin diperlukan untuk sinkronisasi kegiatan pusat dan daerah serta antardaerah, dan pembangunan sinergi pusat dan daerah serta antardaerah.

Dalam konteks inilah, perencanaan pembangunan nasional memiliki peranan

yang sangat penting dalam membawa perubahan pada kondisi bangsa dan negara ke arah kondisi yang lebih baik dan lebih maju. Sesuai dengan mandat UU No 25/2004 yang mengatur keseluruhan sistem perencanaan pembangunan maka perencanaan pembangunan, dituangkan dalam dokumen yang berkesinambungan, baik yang bersifat jangka panjang, menengah, maupun pendek atau tahunan, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Berikut beberapa dokumen yang terkait dengan perencanaan pembangunan nasional.

TABEL 11.1
BEBERAPA DOKUMEN TERKAIT PERENCANAAN NASIONAL
TAHUN 2004 – 2009

No	Dokumen	Keterangan
1	Rencana Kerja Pemerintah (RKP)	2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010
2	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)	2004—2009
3	Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN)	2005—2025
4	<i>Blue Book</i> Pinjaman Hibah Luar Negeri	2005—2009
5	Evaluasi Pelaksanaan RPJMN 2004—2009	Evaluasi 2 tahun, 3 tahun, dan 4 tahun pelaksanaan
6	Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	2007, 2008, 2009
7	Buku Pegangan Pemerintah Daerah	2006, 2007, 2008, 2009
8	Blue Print Rekonstruksi dan Rehabilitasi NAD-Nias	2005
9	Buku Kemitraan Pemerintah dan Swasta (<i>Public Private Partnership</i>)	2009

Secara makro, kinerja pembangunan nasional dapat dilihat dari beberapa indikator, (i) pencapaian tingkat pertumbuhan ekonomi, (ii) peningkatan kesejahteraan rakyat, (iii) pengurangan kemiskinan, (iv) pengurangan tingkat kesenjangan antardaerah, (v) peningkatan kualitas hidup rakyat, khususnya pendidikan dan kesehatan, (vi) perluasan lapangan kerja dan pengurangan pengangguran. Dalam berbagai dokumen rencana pembangunan, berbagai indikator kinerja tersebut disebutkan secara jelas, baik dalam dokumen rencana pembangunan jangka menengah atau RPJMN maupun dalam dokumen rencana pembangunan tahunan atau RKP. Kinerja pembangunan tersebut menjadi komitmen semua pihak, khususnya instansi



pemerintah, untuk dapat merealisasikannya.

Dengan lebih terbaginya kewenangan pelaksanaan pembangunan, maka kebutuhan akan koordinasi dan kerja sama di antara aktor-aktor pembangunan, baik sektoral maupun daerah, menjadi lebih penting. Untuk menunjang sinergi program dan kegiatan pembangunan pada berbagai tingkatan pemerintah tersebut, setiap proses penyusunan dokumen perencanaan selalu dilaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan yang diikuti semua pemangku kepentingan. Musyawarah ini dilaksanakan di berbagai tingkatan pemerintah mulai dari desa hingga pemerintah pusat. Di dalam musyawarah perencanaan pembangunan nasional dilakukan sinkronisasi program dan kegiatan yang dilakukan oleh Kementerian/Lembaga dengan perencanaan pemerintah daerah, baik yang berjangka tahunan maupun jangka menengah. Sinkronisasi tersebut dalam bentuk penandingan program dan kegiatan Kementerian/Lembaga yang akan dilaksanakan dengan program dan kegiatan usulan daerah dalam koridor prioritas nasional. Dalam kerangka penyiapan dokumen RPJMN ini juga telah dilakukan penyampaian dan pembahasan pelaksanaan prioritas nasional jangka menengah yang akan dilaksanakan di daerah. Diharapkan sinkronisasi ini akan meningkatkan efektivitas dan efisiensi dari kebijakan pembangunan guna pencapaian sasaran nasional.

Konsepsi tentang kinerja pembangunan nasional saat ini dan di masa mendatang senantiasa menjadi perhatian publik secara luas. Pelaksanaan Pemilihan Presiden dan Pemilihan Kepala Daerah secara langsung membawa implikasi bagi pemerintah untuk menjabarkan aspirasi rakyat dalam proses perencanaan pembangunan dan dituntut untuk mengomunikasikan hasil-hasil atau kinerja pembangunan yang telah dicapai kepada masyarakat atau publik. Di sisi lain, saat ini publik secara langsung juga dapat mencermati, serta memberikan pendapat dan kritik secara terbuka kepada pemerintah atas pelaksanaan pembangunan. Oleh karena itu, pemerintah harus dapat secara cermat merancang kebijakan pembangunan nasional yang secara garis besar terdiri dari 2 (dua) kelompok kebijakan yaitu regulasi dan pendanaan. Kebijakan regulasi dimaksudkan untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan, sedangkan kebijakan pendanaan digunakan untuk membiayai secara langsung intervensi pemerintah.

Dengan adanya transformasi dalam manajemen perencanaan pembangunan, kinerja instansi pemerintah tidak lagi hanya diukur dari kemampuan menyerap anggaran dan frekuensi kegiatan yang dilakukan. Kinerja harus juga diukur, antara lain dari aspek efisiensi dan efektivitas yang dicapai, kualitas produk baik kebijakan maupun pelayanan publik yang mampu diberikan, dan tingkat pencapaian tujuan organisasi. Bahkan, kinerja, juga harus dilihat dari indikator *outcome* yakni manfaat yang dapat diberikan secara luas kepada publik/masyarakat, seperti kualitas pelayanan publik, kepuasan masyarakat, peningkatan kualitas hidup rakyat, dan indikator lainnya yang relevan dengan tugas dan fungsi instansi pemerintah.

Sejalan dengan penerapan perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja, langkah perkuatan pemantauan dan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan menjadi sangat penting. Hasil pemantauan dan evaluasi ini dapat digunakan untuk perbaikan pelaksanaan rencana pembangunan dan sebagai masukan untuk perencanaan atau proses penyusunan rencana berikutnya.

Untuk menunjang pelaksanaan pembangunan tersebut dilakukan pula berbagai langkah untuk meningkatkan kapasitas aparatur, baik di pemerintah pusat maupun daerah terutama peningkatan kapasitas intitusi perencana. Pemerintah melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas telah memberikan beasiswa kepada perencana pusat dan daerah untuk mengikuti pendidikan gelar dan nongelar, baik di dalam maupun luar negeri. Tabel 11.2 menunjukkan jumlah penerima beasiswa pendidikan gelar dalam dan luar negeri dalam upaya meningkatkan kapasitas perencana.

TABEL 11.2
PENINGKATAN KAPASITAS PERENCANA

Program	Tahun			
	2006	2007	2008	2009
	orang	orang	orang	orang
Program S3 Dalam Negeri	9	2	2	12
Program S3 Luar Negeri				2
Program S2 Linkage Luar Negeri	149	145	143	148
Program S2 Dalam Negeri	315	282	278	288
Jumlah	473	429	423	450

Proses perencanaan memerlukan kapasitas data dan statistik yang baik. Oleh karena itu, ketersediaan data dan statistik yang andal merupakan salah satu kunci keberhasilan perencanaan. Data dan statistik yang berkualitas merupakan rujukan bagi upaya perumusan kebijakan dalam menyusun perencanaan, melakukan pemantauan/*monitoring*, dan mengevaluasi program agar sasaran yang telah ditetapkan sehingga tujuan pembangunan, yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, dapat dicapai dengan efektif.

Permintaan data dan informasi statistik yang beragam, tepat waktu dan berkelanjutan terus meningkat seiring dengan semakin tingginya kesadaran pengguna terhadap pentingnya data dan informasi statistik. Data dan informasi statistik tidak hanya dibentukkan instansi pemerintah di tingkat pusat maupun daerah, tetapi juga

dari kalangan akademisi, lembaga penelitian, dan kalangan dunia usaha.

Untuk dapat mewujudkan kebutuhan pengguna dari berbagai kalangan tersebut, terus diupayakan berbagai langkah perkuatan jenis serta kualitas data dan informasi statistik. Selain itu, pengembangan metodologi dan sistem informasi terus ditingkatkan guna mengembangkan jaringan informasi statistik serta penguasaan teknologi sehubungan dengan semakin beragamnya kebutuhan data statistik dan pesatnya kemajuan teknologi sebagai prasyarat dalam menyajikan informasi statistik yang akurat, terpercaya, dan tepat waktu.

Perkuatan sistem data dan informasi pembangunan ini memiliki peran strategi, untuk mendukung pencapaian keberhasilan pembangunan nasional. Dalam setiap unit organisasi, khususnya organisasi pemerintah, yang produk kebijakannya dapat berdampak luas pada masyarakat dan didalamnya terdapat lingkungan sosial politik yang dinamis, diperlukan adanya basis data yang dikelola dengan baik. Sistem manajemen informasi dan Basis Data menjadi kebutuhan dalam keseluruhan proses perencanaan pembangunan nasional. Dalam konteks ini, sistem data dan informasi diartikan sebagai suatu sistem informasi yang diperlukan bagi proses perencanaan untuk menghasilkan kebijakan dan keputusan tentang rencana pembangunan, sasaran dan hasil-hasil yang telah dicapai.

Guna memenuhi kebutuhan data dan informasi statistik tersebut, sampai dengan tahun 2009 telah dipublikasikan beberapa indikator ekonomi dan sosial. Indikator ekonomi tersebut mencakup produk domestik bruto, pertumbuhan ekonomi, Inflasi (Indeks Harga Konsumen), ekspor dan impor, nilai tukar petani, industri, pertambangan, keuangan daerah, dan berbagai indeks harga lainnya. Indikator-indikator sosial dihasilkan melalui survei dan sensus kependudukan, ketenagakerjaan, kemiskinan, potensi desa, dan sebagainya. Semua indikator ekonomi dan sosial tersebut telah dapat dihasilkan secara reguler maupun dalam waktu tertentu. Tabel 11.3 di bawah ini menggambarkan beberapa indikator yang dihasilkan.

TABEL 11.3
KETERSEDIAAN BEBERAPA INDIKATOR EKONOMI DAN SOSIAL

Indikator	Implementasi
Ekonomi	
Produk domestik bruto dan pertumbuhan ekonomi	menjadi indikator perkembangan pembangunan indonesia setiap (triwulan)
Inflasi (Indeks Harga Konsumen)	Mengetahui pola konsumsi masyarakat (bulanan)
Indeks Harga Perdagangan	menggambarkan kondisi perekonomian secara umum, deflator

Indikator	Implementasi
Besar	pdb, dan digunakan sebagai dasar penghitungan eskalasi proyek bangunan/konstruksi (bulanan)
Nilai Tukar Petani	untuk menghitung indeks yang diterima petani, indeks bppbm, dan nilai tukar petani (bulanan)
Produksi	mengetahui produktivitas tanaman pangan (4 bulanan)
Industri	untuk mendapatkan karakteristik perusahaan industri (tahunan)
Ekspor dan Impor	untuk mengukur perkembangan ekspor/impor bulanan (bulanan dan tahunan)
Transportasi Nasional	memperoleh data angkutan darat, angkutan laut dan angkutan udara, (bulanan dan tahunan)
Keuangan Daerah	menyediakan data realisasi penerimaan, realisasi pengeluaran rutin dan pembangunan pemerintah daerah provinsi (tahunan)
Konstruksi	diperoleh gambaran mengenai penyerapan tenaga kerja di sektor konstruksi, struktur biaya maupun jumlah serta nilai produksi dari output yang dihasilkan (tahunan)
Sosial	
Kependudukan	mengetahui : jumlah penduduk, jenis kelamin dan kelompok umur, fertilitas, mortalitas, mobilitas/migrasi, sebaran penduduk, sebagai bahan proyeksi jumlah penduduk setiap periode tahunan dan sensus penduduk (10 tahunan)
Ketenagakerjaan	mengetahui keadaan ketenagakerjaan di indonesia untuk perencanaan ketenagakerjaan nasional (semesteran dan tahunan)
Kemiskinan	sebagai data penghitungan jumlah masyarakat miskin dengan periode tahunan
Potensi Desa	digunakan untuk: penentuan status perkotaan/pedesaan dan tertinggal/tidak tertinggal (bersamaan dengan sensus penduduk, sensus pertanian, dan sensus ekonomi)
Kesehatan	sebagai salah satu komponen penghitungan indeks pembangunan manusia (ipm) setiap periode tahunan
Perumahan	data perumahan (periode tahunan dan 10 tahunan)

Permintaan data statistik yang beragam, akurat, dan tepat waktu terus meningkat sejalan dengan meningkatnya kebutuhan informasi statistik untuk perencanaan. Permintaan semacam ini tidak hanya datang dari instansi pemerintah tetapi juga datang dari lembaga internasional, dunia usaha, perguruan tinggi, dan lembaga penelitian lainnya. Dalam rangka mengantisipasi peningkatan kebutuhan data tersebut, BPS secara terus menerus mengembangkan program-program kegiatan di



bidang statistik, mulai dari tahap pengumpulan data, pengolahan, analisis, penyajian, dan diseminasi.

Di samping ditentukan oleh perencanaan yang didukung oleh data dan statistik yang andal, keberhasilan pembangunan juga ditentukan oleh sistem pengadaan barang dan jasanya. Pelaksanaan kegiatan pembangunan harus efisien dan akuntabel, khususnya yang memakai sumber keuangan negara. Oleh karena itu, peran pengadaan barang dan jasa publik berdasarkan Keppres 80 Tahun 2003 adalah sangat penting.

Salah satu tonggak penting dalam bidang pengadaan barang/jasa pemerintah terjadi di penghujung tahun 2007, yaitu dengan dibentuknya Lembaga Pemerintah Non-Kemertrian yang khusus menangani hal-hal yang terkait dengan kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah. Sebagai salah satu komitmen pemerintah dalam rangka mendorong efektivitas dan efisiensi serta terciptanya *good governance* dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah, pada tanggal 6 Desember 2007 Pemerintah membentuk LKPP melalui Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pembentukan LKPP merupakan hasil reformasi dalam bidang keuangan negara/belanja pemerintah dan sekaligus juga terkait dengan reformasi birokrasi. Berbagai langkah telah dilakukan seperti disampaikan dalam tabel 11.4.

TABEL 11.4
UPAYA PERKUATAN PENGADAAN BARANG DAN JASA PUBLIK 2004-2009

Upaya Mengurangi dan Mencegah Penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa	
Pemberian Bimbingan Teknis dan Advokasi	Telah dilaksanakan layanan konsultasi lebih dari 28 ribu layanan melalui berbagai media. Di samping itu, juga telah diberikan layanan kepada lebih dari 8 (delapan) instansi Pusat/Daerah, tiga diantaranya telah selesai dan menghasilkan penghematan sebesar hampir Rp 2 triliun sedangkan sisanya masih dalam proses.
Penyelesaian Sanggah Banding dan Penanganan Pengaduan	Penyelesaian sanggah banding sebanyak 167 kasus dan pengaduan sebanyak 51 kasus.
Penyelesaian Permasalahan Hukum.	Telah diselesaikan sebanyak 12 kasus melalui pemberian bantuan hukum, pemberian pendapat hukum sebanyak 35 kasus dan bantuan saksi ahli sebanyak 5 (lima) perkara.
Upaya Mewujudkan Efisiensi dan Efektivitas Anggaran Negara yang Dibelanjakan Melalui Pengadaan Barang/Jasa	
Penyusunan Sistem Monitoring dan Evaluasi	Hingga kini terdapat 150 instansi pemerintah pusat dan daerah yang menyampaikan tabel <i>monitoring</i> evaluasi disamping itu sedang dipersiapkan <i>database monitoring</i> dan evaluasi pengadaan.
Pengembangan Layanan Pengadaan secara Elektronik (LPSE)	Telah dikembangkan layanan pengadaan secara elektronik di 19 provinsi dengan jumlah LPSE sebanyak 34 dan jumlah instansi/pemerintah daerah yang melakukan pengadaan secara elektronik sebanyak 47 instansi. Jumlah paket yang sudah dilelang melalui layanan pengadaan secara elektronik sampai dengan Desember 2009 adalah 1722 paket dengan jumlah anggaran Rp. 3,4 triliun. Tingkat efisiensi yang dicapai di dua instansi yang banyak melakukan pengadaan secara elektronik (Departemen Keuangan dan Propinsi Jawa Barat) adalah 19 persen sampai dengan 21 persen.
Upaya Mewujudkan Sumber daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa yang Profesional dan Bermartabat	

Fasilitasi Sertifikasi Ahli Pengadaan	Pencapaian sampai dengan September 2009 adalah sekitar 99 ribu orang lulus, dengan rincian yang mendapatkan sertifikat L2 sebanyak lebih dari 78 ribu orang dan sertifikat L4 sebanyak lebih dari 21 ribu orang. Jumlah tersebut tersebar di lebih dari seribu dua ratus Instansi/Lembaga Pusat dan Daerah. Khusus periode tahun 2008 – 2009 terjadi peningkatan tingkat kelulusan peserta ujian sertifikasi pengadaan yaitu dari sebelumnya 13,7 persen (periode 2005 – 2007) menjadi 33,3 persen.
Penyelenggaraan Ujian Sertifikasi Ahli Pengadaan	Telah diberikan bantuan khusus berupa pelatihan dan ujian sertifikasi bagi daerah yang memiliki ahli pengadaan bersertifikat kurang dari 10 orang.
Peningkatan Pelayanan Sistem Ujian Sertifikasi	Pelayanan sistem ujian sertifikasi yang pada awalnya membutuhkan minimal 2 (dua) bulan, saat ini sudah dapat diselesaikan hanya dalam waktu 1 (satu) bulan saja.
Fasilitasi Peningkatan Pengetahuan dan Profesionalitas	Terus dilakukan penyempurnaan terhadap modul pelatihan, disamping itu dijajaki kerjasama dengan beberapa lembaga pelatihan dalam dan luar negeri. Untuk memudahhi para ahli pengadaan barang/jasa pemerintah telah difasilitasi pembentukan Ikatan Ahli Pengadaan Barang/Jasa Indonesia
Upaya Mewujudkan Kebijakan Nasional Pengadaan Barang/Jasa Yang Lebih Jelas, Kondusif Dan Komprehensif	
Penyusunan Pedoman Pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP).	Telah disusun pedoman pembentukan ULP untuk mendorong dan memberikan panduan dalam pembentukan ULP di pusat, provinsi, kabupaten/kota
Perkuatan aturan hukum	Telah disusun revisi Keppres 80/2005 yang meliputi tiga aspek, yaitu restrukturisasi sistematika pembahasan, penambahan aturan baru, dan klarifikasi terhadap beberapa klausul yang dianggap kurang jelas. Disamping itu telah pula penyusunan naskah akademik UU Pengadaan.

11.2 Permasalahan dan Sasaran Pembangunan

11.2.1 Permasalahan

Selama ini masih terdapat permasalahan dalam proses perencanaan pembangunan nasional, yang disebabkan oleh beberapa faktor. *Pertama*; belum sinerginya proses perencanaan pembangunan nasional dari pendekatan politik (proses politik) ke pendekatan teknokratik. *Kedua*, dokumen perencanaan yang disusun belum menekankan pada perencanaan yang terfokus dan langsung dapat dilaksanakan. Dokumen perencanaan yang disusun cenderung masih berupa *wish list*. Program dan kegiatan yang direncanakan masih belum disusun berdasarkan pada ketersediaan

anggaran. Hal ini mengakibatkan perencanaan yang disusun tidak dapat sepenuhnya dilaksanakan. *Ketiga*, adanya ego atau kepentingan antarsektor yang seringkali dinyatakan sebagai kesulitan untuk melakukan koordinasi. Persoalan yang bersifat lintas sektor seringkali ditangani secara parsial dan terfragmentasi sehingga cenderung tidak menyentuh atau menyelesaikan persoalan yang sebenarnya. *Keempat*, adanya anggapan atau asumsi bahwa dokumen perencanaan tersebut kurang mengakomodasi kebutuhan yang sebenarnya dari daerah dan antar wilayah. *Kelima*, proses perencanaan teknokratik yang berbasis pada data sekunder dan primer, baik dari hasil *monitoring* dan evaluasi maupun hasil kajian/telaahan, dianggap masih belum memadai sehingga kekuatan data dan informasi dalam memproyeksikan arah pembangunan berikutnya masih lemah. *Keenam*, masih terdapat kesulitan untuk memastikan adanya konsistensi antara perencanaan (program/kegiatan) pembangunan dan alokasi penganggarnya. *Ketujuh*, belum optimalnya sistem pengendalian dan evaluasinya pembangunan. Hal ini mengakibatkan dokumen perencanaan nasional akan menjadi dokumen legal formal yang bersifat statis, yang kurang optimal dalam mengawal dan mengakselerasi proses pencapaian tujuan pembangunan nasional.

Di samping itu, implementasi sistem perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja belum sepenuhnya dapat dilaksanakan. Reformasi dalam pengelolaan keuangan negara dimulai dengan terbitnya diberlakukannya satu paket perundang-undangan bidang keuangan negara, yaitu UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara, UU No. 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara. Perubahan mendasar dengan diterbitkannya tiga UU tersebut adalah penerapan sistem anggaran berbasis kinerja (*performance based budgeting*) dalam pengelolaan keuangan negara dan perencanaan kinerja, pertanggungjawaban dan pengelolaan kinerja, evaluasi kinerja serta pemberlakuan pemeriksaan (audit) kinerja. Selanjutnya, terbit pula UU No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang mengatur aspek perencanaan yang juga menekankan manajemen berbasis kinerja dalam setiap perencanaan pembangunan dan kegiatan dalam lingkungan instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah.

Namun, dalam implementasinya, masih terdapat permasalahan bahwa mandat keempat UU tersebut belum dilaksanakan sepenuhnya. Dalam penerapan perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja, misalnya masih sulit untuk memastikan bahwa terdapat hubungan yang lebih jelas antara tujuan, sasaran, program, dan kegiatan instansi pemerintah untuk mewujudkan prioritas pembangunan dan anggaran yang dikeluarkan. Program dan kegiatan di lingkungan instansi pemerintah pada umumnya sulit diukur dan belum memiliki standar kinerja yang jelas (atau tidak dapat segera diukur dalam pengertian per unit keluaran ataupun biaya per unit; dan ukuran pencapaian kerjanya).

Implementasi kerangka pengeluaran berjangka menengah (*medium term expenditure framework/MTEF*). Hal ini belum terlaksana dengan baik juga dapat dilihat



pada belum terwujudnya keterkaitan proses perencanaan dengan penganggaran, yang mengarah kepada pengalokasian sumber daya yang lebih rasional dan strategis. Perencanaan kegiatan dan penganggaran juga masih bersifat parsial dan berjalan kurang sinergis. Keterpaduan anggaran (*unified budget*) juga belum dilaksanakan secara optimal. Kegiatan di lingkungan instansi pemerintah yang menggunakan keuangan negara juga tidak sepenuhnya dirumuskan dengan indikator kinerja yang jelas dan terukur.

Pada hakekatnya, semua sebab tersebut mencerminkan kebutuhan perbaikan manajemen pembangunan. Manajemen pembangunan harus dapat menjaga konsistensi dan keterkaitan perencanaan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional dengan penganggaran dalam sistem keuangan negara, pelaksanaan dan pelaporan keuangan dalam sistem akuntansi pemerintah, dan kinerja dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah serta pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan dalam sistem pengendalian dan evaluasi. Artinya perencanaan pembangunan, tidak akan memiliki kekuatan yang memadai dalam mengarahkan pencapaian tujuan pembangunan, apabila tidak menjadi acuan dalam proses penganggarannya. Kondisi tersebut akhirnya menyebabkan tidak optimalnya penggunaan sumberdaya nasional serta tidak tercapainya beberapa tujuan pembangunan nasional.

Selanjutnya, di dalam penyediaan data dan statistik yang andal, paling tidak terdapat dua permasalahan utama yang dihadapi dalam perencanaan pembangunan nasional di bidang statistik. *Pertama*, dengan diimplementasikannya kebijakan otonomi daerah menurut UU No 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya, kebutuhan akan berbagai ragam data dan informasi statistik untuk mendapatkan gambaran yang sebenarnya mengenai kondisi dan permasalahan yang dihadapi setiap daerah semakin meningkat. Hingga saat ini, penyediaan berbagai jenis dan keragaman data dan informasi statistik yang dibutuhkan di daerah ini masih belum dapat dipenuhi.

Kondisi daerah yang sulit terjangkau masih menjadi permasalahan yang belum teratasi, yang mengakibatkan terhambatnya pengiriman dokumen sebelum dan setelah pencacahan. Kurangnya SDM statistik yang profesional, khususnya di wilayah Indonesia bagian timur, Indonesia juga menjadi permasalahan tersendiri. Disamping itu, koordinasi antarinstansi disadari masih kurang sehingga data dan informasi statistik yang dibutuhkan masih tumpang tindih, bahkan cenderung sulit untuk disediakan.

Kedua, rendahnya kesadaran responden untuk memberikan informasi yang benar masih menjadi permasalahan utama dari petugas statistik untuk memperoleh hasil yang akurat dan tepat waktu. Kasus ini lebih banyak terjadi pada responden perusahaan, walaupun mereka juga memerlukan data dan informasi statistik.

Koordinasi antar-pemangku kepentingan statistik juga belum terbentuk dengan baik. Meskipun PP tentang Sistem Statistik Nasional (SSN) sudah diundangkan, hal ini masih dalam ranah praksis. Secara praktis, penyelenggara statistik sektoral dan statistik

khusus belum menyadari pentingnya terbangun SSN secara terpadu. Di sisi lain, walaupun tidak sedikit akademisi dan institusi penyelenggara pendidikan statistik, pemahaman akan arti dan pentingnya statistik belum menjadi pemikiran masyarakat secara luas.

Sebagai implikasi dari penerapan anggaran berbasis kinerja dalam kerangka pelaksanaan reformasi sistem perencanaan dan penganggaran, pengguna anggaran negara akan diberikan fleksibilitas yang lebih dalam mengelola dan menggunakan anggarannya dengan tujuan pencapaian sasaran pembangunan. Fleksibilitas ini diberikan dengan dibarengi perkuatan akuntabilitas pengelolaan dan penggunaan anggaran. Salah satu sisi dari manajemen pembangunan yang terkait dengan hal ini adalah sistem pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.

Dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa publik di lingkungan instansi pemerintah, masih terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi terkait dengan pengadaan barang/jasa pemerintah. *Pertama*, masih banyak kasus penyimpangan terkait proses pengadaan barang/jasa pemerintah yang ditemukan dan ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), serta lembaga pengawasan lainnya. Kasus korupsi terkait pengadaan barang/jasa pemerintah mencakup sekitar 80 persen dari seluruh kasus yang ditangani. *Kedua*, masih tingginya inefisiensi dan inefektivitas belanja negara. Bahkan besarnya inefisiensi tersebut diperkirakan berkisar antara 10 sampai dengan 40 persen. *Ketiga*, belum sinkronnya peraturan pengadaan barang/jasa pemerintah dengan peraturan terkait lainnya. *Keempat*, masih rendahnya pemahaman dan penerapan peraturan di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah, dan *kelima*, masih rendahnya implementasi sistem *e-procurement*.

Permasalahan yang dihadapi terkait dengan pengadaan barang/jasa pemerintah adalah masih banyaknya kasus-kasus korupsi terkait proses pengadaan yang ditemukan dan ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan juga Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Kasus korupsi terkait dengan pengadaan barang/jasa pemerintah diperkirakan mencakup sekitar 80 persen dari seluruh kasus yang ditangani kedua lembaga tersebut. Selain itu, hasil audit yang dilakukan oleh berbagai lembaga pengawasan seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), BPKP, Inspektorat Jenderal maupun Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota menyimpulkan bahwa temuan yang terkait dengan proses pengadaan barang/jasa masih cukup signifikan. Temuan-temuan tersebut umumnya terkait dengan ketidaktaatan terhadap prosedur pengadaan dan proses pengadaan. Disisi lain, masyarakat juga menemukan dugaan adanya indikasi tindak korupsi, kolusi, dan nepotisme pada proses pengadaan barang/jasa di lembaga pemerintah di berbagai instansi pemerintah pusat dan daerah.

Selain tingginya angka penyimpangan pada proses pengadaan barang/jasa, masalah lain yang juga mengemuka adalah masih tingginya inefisiensi belanja barang/jasa pemerintah. Besarnya inefisiensi tersebut diperkirakan berkisar antara 10



sampai dengan 40 persen. Selanjutnya, rendahnya penyerapan anggaran atau adanya keterlambatan proses pengadaan juga masih merupakan masalah yang harus segera diatasi, mengingat rendahnya penyerapan anggaran dapat mengurangi aktivitas ekonomi, dan mempengaruhi kualitas pelayanan yang seharusnya diberikan oleh birokrasi kepada masyarakat.

11.2.2. Sasaran

Sasaran utama dari bab ini adalah “terwujudnya sistem pendukung yang kuat bagi pencapaian tujuan dan sasaran RPJMN 2010-2014”, dengan Visi: “Mewujudkan Indonesia yang sejahtera, demokratis dan berkeadilan”. Adapun keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran yang menjadi tanggung jawab semua kementerian/lembaga yang akan diukur dengan indikator kinerja, target keberhasilan RPJMN yang berhasil dicapai, serta target /sasaran RKP yang berhasil dicapai setiap tahun pada periode RPJMN 2010-2014.

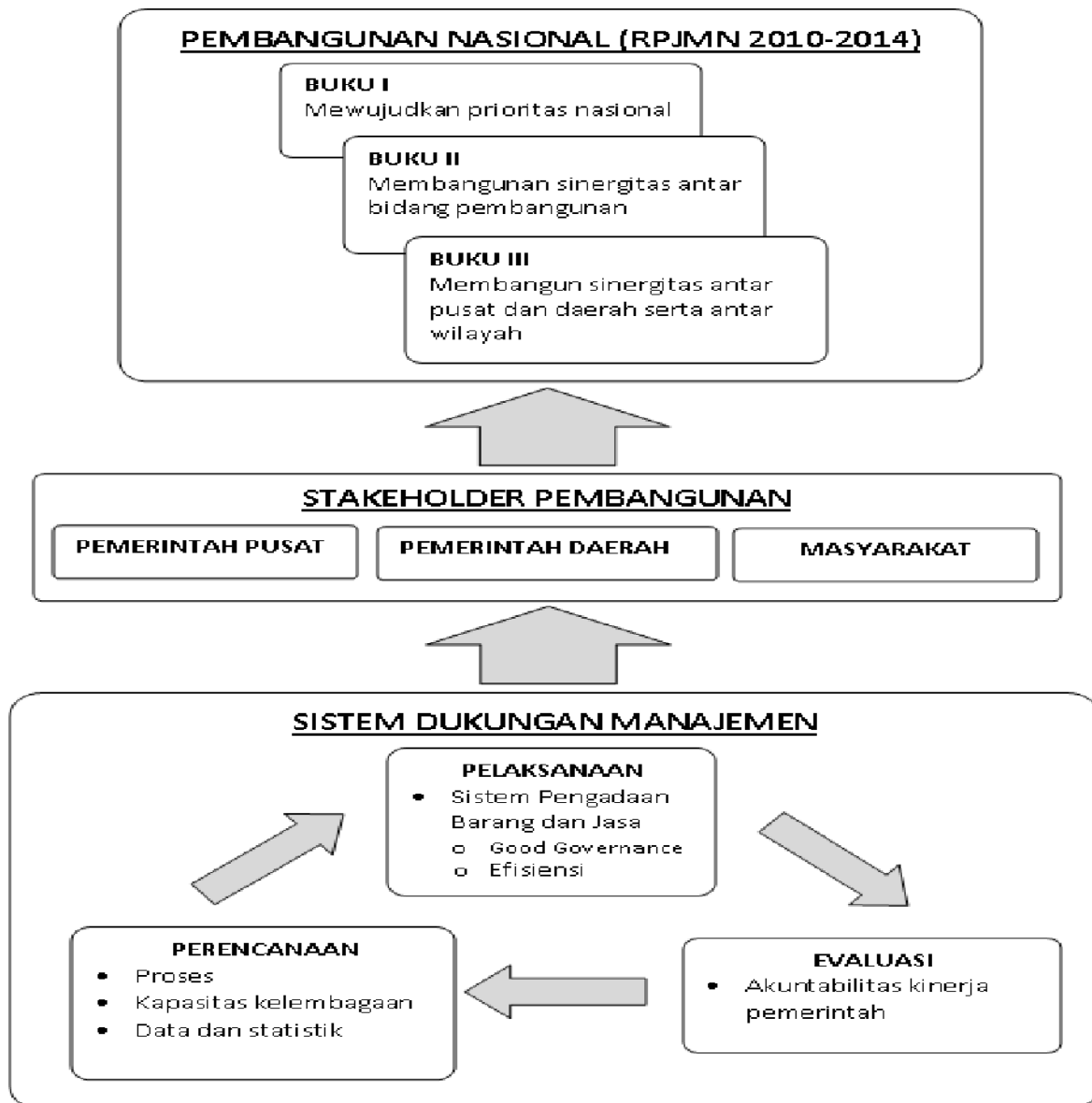
Untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMN ini, sasaran untuk bidang perencanaan pembangunan, data dan statistik, serta kebijakan pengadaan barang dan jasa publik diarahkan untuk mewujudkan :

1. Rencana pembangunan nasional (RPJMN dan RKP) yang berkualitas.
2. Data dan informasi statistik yang lengkap, akurat, dan tepat waktu di seluruh bidang pembangunan serta meningkatnya pelayanan bagi pengguna data statistik.
3. Proses pengadaan barang dan jasa publik di lingkungan instansi pemerintah secara transparan, akuntabel, adil dan efisien, serta menurunnya praktik penyimpangan atau KKN.

11.3 Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan

Kerangka pikir dan keterkaitan tiga komponen sistem pendukung manajemen pembangunan nasional, yaitu perencanaan pembangunan, data dan statistik, serta pengadaan barang dan jasa dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 11.1
KERANGKA PIKIR ARAH KEBIJAKAN PERKUATAN SISTEM PENDUKUNG
MANAJEMEN PEMBANGUNAN NASIONAL



Sasaran pembangunan nasional jangka menengah dituangkan dalam dokumen perencanaan jangka menengah. Di dalam strategi pembangunan jangka menengah 2010—2014, pencapaian sasaran prioritas pembangunan nasional jangka menengah diarahkan untuk dicapai dengan sinergi antarbidang pembangunan, serta sinergi antarpusat dan daerah, serta antarwilayah.

Dalam pelaksanaannya, upaya untuk mewujudkan sasaran pembangunan ini



melibatkan pemerintah baik pusat maupun daerah serta masyarakat. Untuk mendukung efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pembangunan yang dilakukan oleh para pemangku kepentingan tersebut, perlu dilakukan perkuatan atas manajemen pembangunan.

Pada dasarnya, terdapat tiga aspek penting di dalam manajemen pembangunan nasional, yaitu sisi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Ketiga aspek ini saling mendukung satu sama lainnya. Pada sisi perencanaan, perkuatan perlu dilakukan dari sisi proses penyusunan perencanaan, kapasitas kelembagaan, serta ketersediaan dan kapasitas data dan statistik. Di dalam pelaksanaan rencana yang disusun tersebut, salah satu isu utama yang perlu diperkuat adalah sistem pengadaan barang dan jasa publik. Kelancaran sistem ini akan mendukung kelancaran pembangunan dengan tidak menepikan unsur *good governance*. Pada sisi ketiga adalah evaluasi pelaksanaan pembangunan. Evaluasi yang dilakukan ke depan akan lebih diutamakan pada aspek pencapaian kinerja pembangunan. Perkuatan akuntabilitas pelaksana pembangunan merupakan elemen penting dari proses evaluasi ini. Hasil evaluasi ini pada gilirannya akan di jadikan sebagai masukan dalam proses perencanaan.

11.3.1 Penguatan Perencanaan Pembangunan

Dengan mengacu pada indikator kinerja dari keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran RPJMN 2010-2014 dan RKP, prioritas perencanaan pembangunan nasional lima tahun ke depan adalah mewujudkan rencana pembangunan nasional baik jangka menengah maupun tahunan yang berkualitas. Hal ini diukur dengan indikator kinerja utamanya yaitu tercapainya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antardaerah, antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah, serta antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan, yang diukur dengan (indikator): a) RPJMN 2010-2014 dan RKP tahun 2010 sampai dengan 2014 memiliki tujuan, target, dan sasaran yang jelas dan terukur; b) Renstra kementerian/lembaga dan RPJM Daerah memiliki tujuan, target, dan sasaran yang jelas dan terukur dan sesuai dengan RPJMN 2010-2014; c) Rencana Kerja Kementerian/Lembaga dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah memiliki tujuan, target, dan sasaran yang jelas dan terukur dan sesuai dengan RKP.

Untuk mewujudkan sasaran tersebut, disusun sebuah program perencanaan pembangunan nasional. Program ini adalah untuk mendukung tugas-tugas dalam proses perencanaan, pemantauan, evaluasi, dan koordinasi.

Strategi untuk melaksanakan program di atas, selain dengan mengacu kepada UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 2 ayat (4) juga dengan memperhatikan dinamika lingkungan strategis, adalah sebagai berikut: a) mengoordinasikan para pelaku pembangunan b) mengoptimalkan partisipasi masyarakat dan c) melakukan berbagai upaya, antara lain melalui pemantauan, evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan, dan evaluasi atau kajian kebijakan untuk: 1) menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antardaerah, antarruang, antarwaktu, dan antarfungsi pemerintah, maupun antara pusat dan daerah; 2)

menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan; dan 3) menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Dalam hal peningkatan kapasitas SDM, khususnya SDM perencana di tingkat pusat dan di tingkat daerah, strategi yang dilakukan perlu diarahkan kepada dua fokus utama, yaitu : (1) peningkatan kompetensi dan profesionalitas SDM perencana dan (2) peningkatan kualitas keluaran instansi perencanaan pembangunan di tingkat pusat dan di tingkat daerah.

Dalam hal fokus pertama, strategi yang akan dilakukan antara lain (1) merumuskan kembali kompetensi yang diperlukan SDM perencana dalam (a) melakukan perumusan kebijakan dan pendekatan perencanaan teknokratis (b) melakukan penyusunan rencana dan anggaran, serta pemantauan dan evaluasi, (c) melakukan proses perencanaan sesuai dengan kewenangan pemerintah pusat dan daerah yang diatur dalam ketentuan dan perundang-undangan tentang desentralisasi dan otonomi daerah, dan (d) melakukan integrasi, sinkronisasi dan sinergi, baik antardaerah, antarruang, antarwaktu, dan antarfungsi pemerintah, maupun di antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan: (2) merancang kembali materi-materi (kurikulum) yang harus dikuasai SDM perencana sesuai dengan kebutuhan kompetensi tersebut ke dalam program dan kegiatan pendidikan dan pelatihan (program gelar, non-gelar, penjurusan dan teknis/substantif), bantuan/bimbingan teknis dan/atau kegiatan sosialisasi; dan (3) menyusun prioritas instansi perencanaan di pusat dan di daerah, sebagai target sasaran per tahun.

Produktivitas dan kualitas keluaran instansi perencanaan bukan hanya ditentukan oleh memadainya kompetensi dan profesionalitas SDM perencana, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh struktur/kultur organisasi, mekanisme kerja, dan konsep pembinaan pola karir perencana. Oleh karena itu, berkaitan dengan fokus kedua, strategi yang akan dilakukan antara lain (1) memperjelas kebijakan nasional tentang : (a) struktur organisasi instansi pemerintah di bidang perencanaan pembangunan di pusat dan di daerah, (b) kedudukan dan hubungan kerja jabatan fungsional di dalam instansi perencanaan, dan (c) pola pembinaan dan pengembangan karir perencana di pusat dan di daerah; (2) memperkuat jejaring kerja sama instansi perencanaan di pusat dan di daerah dalam rangka pembinaan perencana dan peningkatan peran kelembagaan perencanaan sesuai dengan SPPN ; dan (3) memperkuat jejaring kerja sama dan forum profesional dengan organisasi profesi perencana, perguruan tinggi, dan organisasi profesi lainnya.

11.3.2 Perkuatan Data dan Statistik

Prioritas pembangunan jangka menengah data dan statistik adalah peningkatan kualitas statistik nasional. Kualitas data diukur dalam enam dimensi, yaitu akurat, relevan, tepat waktu/timeliness, mudah diakses/accessibility, koheren/coherence yang



berarti konsisten antarsektor dan antar periode dan spasial, serta mudah diinterpretasi/interpretability.

Untuk mewujudkan sasaran tersebut dirumuskan tiga langkah; (1) peningkatan kualitas data, (2) peningkatan penerapan teknologi informasi dan komunikasi, dan (3) peningkatan kapasitas SDM.

Statistik bermutu tinggi dan dapat diandalkan yang dihasilkan secara tepat waktu merupakan bagian esensial dalam proses perumusan suatu kebijakan. Hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya kualitas data statistik ekonomi, meningkatnya kualitas data statistik kesejahteraan rakyat, meningkatnya manajemen survei, meningkatnya metodologi survei, meningkatnya dan berkembangnya analisis, statistik, meningkatnya hubungan dengan pengguna data meningkatnya efektivitas dan efisiensi diseminasi data statistik, serta meningkatnya penerapan teknologi informasi dan komunikasi. Peningkatan kualitas data statistik selama ini baru terfokus kepada perbaikan metodologi dan teknis statistik. Saat ini perbaikan yang dilakukan diharapkan mulai menyentuh seluruh aspek seperti penelaahan kembali proses ketatalaksanaan, (*business process review*), pengembangan kapasitas TIK (teknologi informasi komunikasi). Keberhasilan upaya peningkatan kualitas data statistik ini tidak terlepas dari dukungan dan peranan TIK, yang diwujudkan melalui pembangunan arsitektur dan kerangka TIK dan manajemen informasi. Hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya penggunaan TIK statistik. Keberhasilan peningkatan kualitas data statistik sangat memerlukan dukungan dan peranan dari SDM (sumber daya manusia). Hal ini menunjukkan meningkatnya kapasitas tenaga statistik di pusat dan daerah.

Pembangunan kapasitas dan penyediaan data statistik nasional direncanakan akan dilakukan melalui sebuah program teknis kestatistikan, yaitu program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik. Program ini akan menjadi sebuah rencana kerja institusi penyedia data dan statistik, baik di pusat maupun daerah.

11.3.3 Perkuatan Pengadaan Barang dan Jasa Publik

Arah kebijakan perkuatan sistem pengadaan barang dan jasa publik ke depan adalah menyinergikan antara fleksibilitas dan akuntabilitas penggunaan anggaran. Fleksibilitas ini penting untuk mengakomodasi kecepatan dan terobosan yang dibutuhkan dalam pengadaan barang dan jasa publik untuk mencapai sasaran pembangunan. Namun sistem pengadaan harus tetap dibarengi dengan peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengadaannya.

Di dalam mewujudkan proses pengadaan barang dan jasa publik di lingkungan instansi pemerintah yang transparan, akuntabel, adil dan efisien, serta menurunkan praktek penyimpangan atau KKN dilakukan dengan hal sebagai berikut. *Pertama* mengurangi dan mencegah penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa. Hal ini dimaksudkan secara bertahap mengurangi berbagai kejadian penyimpangan yang terjadi pengadaan sesuai dengan hasil audit yang dilakukan oleh berbagai lembaga

pengawasan yang ada. *Kedua* mewujudkan efisiensi dan efektivitas anggaran negara yang dibelanjakan melalui pengadaan barang/jasa. Dalam rangka meningkatkan efisiensi dalam proses pengadaan barang dan jasa ini perlu dilakukan beberapa upaya, seperti (i) mendorong penyusunan rencana pengadaan barang/jasa melalui aplikasi yang terintegrasi dengan pengusulan anggaran, (ii) pemantauan terhadap pelaksanaan pengadaan barang/jasa agar sesuai dengan rencana, serta (iii) mendorong pelaksanaan *e-procurement* di seluruh instansi pemerintah pusat dan daerah. Jika ketiga hal ini dilakukan, diharapkan dapat terwujud efisiensi dan efektivitas anggaran negara dalam pengadaan barang/jasa. *Ketiga* meningkatkan kapasitas SDM yang menangani pengadaan barang/jasa; Upaya peningkatan kinerja birokrasi secara efisien dan akuntabel dalam proses pengadaan barang dan jasa publik dilakukan melalui upaya untuk pengembangan sumber daya manusia di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah yang profesional. Secara nasional kebutuhan tenaga pengadaan yang bersertifikat keahlian pengadaan barang/jasa lebih difokuskan untuk memenuhi kebutuhan tenaga Unit Layanan Pengadaan. *Keempat* mewujudkan kebijakan nasional pengadaan barang/jasa yang jelas, kondusif dan komprehensif. Dalam rangka mewujudkan proses pengadaan barang/jasa yang efisien, transparan, kredibel serta tidak menimbulkan penyalahgunaan wewenang, maka dibutuhkan seperangkat kebijakan dan peraturan yang mampu secara jelas mengatur proses pengadaan barang/jasa secara nasional. Kebijakan maupun peraturan ini harus selaras dengan berbagai kebijakan lain yang terkait.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2010
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH NASIONAL
(RPJMN)
TAHUN 2010--2014**

**LAMPIRAN BUKU II
RENCANA TINDAK KEMENTERIAN DAN LEMBAGA**

**Diperbanyak Oleh:
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS)
2010**

**RENCANA TINDAK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH 2010-2014
PER KEMENTERIAN/LEMBAGA**

KEMENTERIAN/LEMBAGA : MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT

NO	PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITYAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
1	Program Pelaksanaan Tugas Konstitusional MPR dan Alat Kelengkapannya (MPR RI)	Terlaksananya tugas konstitusional MPR dan alat kelengkapannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	1 Peraturan Tata Tertib MPR dan Kode Etik Anggota MPR	100%	-	713,2
			2 Terlaksananya Sidang Akhir Masa Jabatan MPR periode 2009-2014	-	1 kali	
			3 Terlaksananya Sidang Awal Masa Jabatan Anggota periode tahun 2014-2019	-	1 kali	
			4 Terlaksananya Sidang Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden hasil Pemilu 2014	-	1 kali	
			5 Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap Nilai-Nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika	100%	100%	
1.1	Pelaksanaan Tugas MPR	Terumuskannya berbagai aturan dan tata cara pelaksanaan tugas-tugas konstitusional MPR sebagaimana- na tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta terlaksananya sidang MPR	1 Tersedianya peraturan Tata Tertib MPR	100%	-	13,0
			2 Tersedianya kode etik anggota MPR	100%	-	
			3 Terlaksananya Sidang Akhir Masa Jabatan MPR periode 2009-2014	-	100%	
			4 Terbentuknya MPR masa Jabatan periode tahun 2014-2019	-	100%	
			5 Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden hasil Pemilu 2014	-	100%	

KEMENTERIAN/LEMBAGA : MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT

NO	PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITYAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
1.2	Pelaksanaan Tugas Pimpinan MPR	Terlaksananya sosialisasi Nilai-Nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika	1 Jumlah badan diklat provinsi yang telah menyelenggarakan TOT untuk masing-masing 50 widyaiswara	7 badan diklat provinsi	31 badan diklat provinsi ^{K)}	700,2
			2 Jumlah pelaksanaan sosialisasi di daerah pemilihan masing-masing oleh seluruh Anggota MPR	2768	13.148 ^{K)}	
			3 Jumlah sekolah yang mengikuti seleksi cerdas cermat dari 33 provinsi	594 sekolah	594 sekolah	
			4 Jumlah sosialisasi publik melalui dialog interaktif di TVRI dan RRI	80 kali	400 kali ^{K)}	
			5 Jumlah organisasi/kelompok masyarakat yang bekerjasama dengan MPR menyelenggarakan Sosialisasi	25 ormas	200 ormas ^{K)}	
			6 Jumlah Kabupaten/Kota yang bekerjasama dengan MPR menyelenggarakan Sosialisasi untuk aparaturn Pemerintah Daerah serta guru PPKN dan sejarah.	50 kab/kota	50 kab/kota	
			7 Jumlah balibo yang terpasang di 33 provinsi	165 buah	825 buah ^{K)}	
			8 Jumlah paket bahan ajar untuk sekolah tingkat dasar, menengah, dan lingkungan pendidikan agama di 33 provinsi	165.000 paket	825.000 paket ^{K)}	
			9 Jumlah Lomba karya tulis konstitusi untuk tingkat pelajar dan mahasiswa	2 lomba	10 lomba ^{K)}	
			10 Jumlah paket buku yang terdistribusi ke perpustakaan sekolah di 33 provinsi	165.000 paket	825.000 paket ^{K)}	
			11 Jumlah paket buku yang terdistribusi pada acara sosialisasi yang dilaksanakan oleh para trainer di daerah	10.000 paket	50.000 paket ^{K)}	
			12 Jumlah iklan layanan masyarakat di televisi	7.300 kali tayang	36.500 kali tayang ^{K)}	

KEMENTERIAN/LEMBAGA : MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT

NO	PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
2	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis MPR (Setjen MPR)	Meningkatnya kualitas pelayanan teknis dan administrasi kepada MPR dan Alat Kelengkapannya	1 % Dukungan teknis dan administrasi persidangan MPR dan Alat kelengkapannya	100%	100%	213,4
			2 % Dukungan teknis dan administrasi kesekretariatan pimpinan MPR	100%	100%	
			3 % Dukungan teknis dan administrasi Kehumasan	100%	100%	
			4 % Dukungan teknis dan administrasi Keanggotaan dan Kepegawaian	100%	100%	
			5 % Dukungan teknis dan administrasi Keuangan	100%	100%	
			6 % Dukungan teknis dan administrasi Pengkajian	100%	100%	
2.1	Dukungan teknis dan administrasi persidangan MPR dan Alat kelengkapannya	Terlayannya dukungan teknis dan administrasi persidangan MPR dan Alat kelengkapannya	1 % Dukungan pelaksanaan sidang MPR dan Alat Kelengkapannya	100%	100%	
			2 % Dukungan pelaksanaan sosialisasi	100%	100%	
2.2	Pelaksanaan Tugas Kesekretariatan Pimpinan (Biro Sekretariat Pimpinan)	Terlaksananya dukungan kesekretariatan dan kegiatan Pimpinan MPR	1 % Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtangga-an Pimpinan MPR	100%	100%	32,6
			2 % Fasilitasi kegiatan Pimpinan MPR	100%	100%	
2.3	Penyelenggaraan Kehumasan (Biro Hubungan Masyarakat)	Terlaksananya kegiatan pemberitaan, keprotokolan, pengolahan data dan sistem informasi, penerbitan naskah kemajelis, serta pelayanan perpustakaan dan dokumentasi dalam lingkup MPR	1 % Dukungan penyebaran informasi kegiatan MPR dan Alat kelengkapannya	100%	100%	69,0
			2 % Pelayanan keprotokolan Pimpinan dan Anggota MPR serta Sekretariat Jenderal	100%	100%	
			3 % Pelayanan penerbitan naskah MPR dan Sekretariat Jenderal	90%	90%	
			4 % Pelayanan perpustakaan dan dokumentasi	60%	100%	
			5 % Dukungan sistem informasi kemajelis	60%	100%	
2.4	Kegiatan Pengelolaan Administrasi MPR dan Sekretariat Jenderal (Biro Administrasi)	Terselenggaranya administrasi keanggotaan dan kepegawaian, perencanaan dan evaluasi, ketatausahaan serta pelayanan kesehatan Sekretariat Jenderal	1 % Dukungan teknis dan administrasi Keanggotaan dan Kepegawaian	100%	100%	50,0
			2 % Dukungan teknis dan administrasi perencanaan dan evaluasi	100%	100%	
			3 % Dukungan teknis dan administrasi ketatausahaan	100%	100%	
			4 % Pelayanan kesehatan	80%	80%	

KEMENTERIAN/LEMBAGA : MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT

NO	PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
2.5	Kegiatan Pengelolaan Administrasi Keuangan MPR dan Sekretariat Jenderal (Biro Keuangan)	Pelayanan administrasi keuangan Pimpinan dan Anggota MPR serta pegawai Sekretariat Jenderal	1 % Pelayanan Pembayaran gaji dan tunjangan	100%	100%	52,5
			2 % Pelayanan Pembukuan dan Verifikasi anggaran	100%	100%	
			3 % Administrasi perjalanan dinas dan perbendaharaan	100%	100%	
2.6	Pengkajian Kemajelis (Pusat Pengkajian)	Pelayanan pengkajian Pimpinan MPR dan Setjen	1 % Dukungan kegiatan pengkajian dan penyusunan naskah pidato	100%	100%	9,4
3	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur MPR (Setjen MPR)	Tersedianya sarana dan prasarana fisik Majelis dan Sekjen yang memadai	1 % Kebutuhan sarana dan prasarana terpenuhi sesuai kebutuhan	80%	80%	63,9
3.1	Pembangunan, Pengadaan, Peningkatan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana MPR (Biro Kerumahtangaan)	Pelayanan perlengkapan dan inventarisasi dalam lingkup MPR dan Sekretariat Jenderal	1 % Ketersediaan peralatan, perlengkapan kerja dan alat tulis kantor	80%	80%	63,9
			2 % Pemeliharaan gedung dan peralatan kantor	100%	100%	
			3 % Ketersedian ruang rapat, ruang kerja, rumah dinas dan akomodasi serta sarana mobilitas lainnya	80%	80%	
			4 % Pelayanan pengamanan di lingkungan kantor dan rumah dinas Pimpinan MPR dan Sekretariat Jenderal	100%	100%	
TOTAL ALOKASI MPR 2010-2014						990,4

K : Angka kumulatif 5 tahun (2010-2014)

**RENCANA TINDAK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH 2010-2014
PER KEMENTERIAN/LEMBAGA**

KEMENTERIAN/LEMBAGA: DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT (SETJEN DPR)

NO	PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
I	Program Pelaksanaan Fungsi Legislasi DPR RI (Deputi Bidang Legislasi)	Terfasilitasinya Dewan dalam penyusunan UU	1. % kajian, naskah akademis, dan draft RUU sesuai standar dan tepat waktu	80%	100%	1.263,0
			2. % pelayanan hukum yg akuntabel dan tepat waktu	90%	100%	
			3. % RUU yang diharmonisasi dan UU yang dilakukan pemantauan	90%	100%	
II	Program Pelaksanaan Fungsi Anggaran DPR RI (Deputi Bidang Anggaran)	Terfasilitasinya Dewan berkenaan dengan Kebijakan APBN yang tepat sasaran, transparan dan akuntabel	% hasil analisis asumsi makro dan pembiayaan defisit sebagai referensi Anggota dalam pembahasan RAPBN dengan tepat waktu	80%	90%	203,5
			% hasil analisis kebijakan negara dan belanja daerah sebagai referensi Anggota dalam pembahasan RAPBN dengan tepat waktu	80%	90%	
III	Program Pelaksanaan Fungsi Pengawasan (Deputi Bidang Pengawasan)	Terfasilitasinya Dewan dalam melaksanakan fungsi Pengawasan	% hasil analisis pengawasan pelaksanaan UU dan kebijakan pemerintah	90%	100%	2.312,9
IV	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya Setjen DPR RI (Deputi Bidang Dukungan Manajemen Dan Persidangan)	Seluruh kegiatan dewan memperoleh dukungan manajemen yang handal	% fasilitas pelaksanaan persidangan yang tepat waktu dan tepat administrasi	75%	90%	789,2
			% fasilitas pelaksanaan tugas pimpinan yang tepat waktu	75%	90%	
			% kelengkapan data dan informasi yang akurat, up-to-date dan akuntabel	75%	90%	
			% pengelolaan SDM yang memenuhi standar	75%	90%	

KEMENTERIAN/LEMBAGA: DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT (SETJEN DPR)

NO	PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
V	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Sekretariat Jenderal DPR RI (Deputi Bidang Administrasi)	Seluruh perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pelaporan menerapkan manajemen yang terintegrasi dengan data yang up to date dan akurat	Kepuasan anggota DPR terhadap kinerja Setjen	75%	90%	6.900,7
			Terbangunnya citra positif DPR/Indeks kepuasan masyarakat terhadap DPR			
			% perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi	75%	90%	
			% kelengkapan sarana dan pra sarana yang tepat guna	75%	90%	
			% pelaporan keuangan dan pelaporan barang milik negara yang akuntabel	75%	90%	
			% aparatur yang kompeten dan kelengkapan administrasi Dewan	75%	90%	
TOTAL ALOKASI DPR RI 2010-2014						11.469,3

**RENCANA TINDAK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH 2010-2014
PER KEMENTERIAN/LEMBAGA**

KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

NO	PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
I	PROGRAM PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA	Meningkatnya cakupan dan mutu pemeriksaan keuangan negara dan pemantauan kerugian negara	Skor opini laporan keuangan	2,6	4	3.977,0
			Peningkatan skor opini laporan keuangan	13%	35%	
			Indeks penerapan GGG	4	4	
			Persentase jumlah temuan krusial yang berulang	30%	5%	
			Indeks kepuasan <i>stakeholders</i> atas hasil pemeriksaan	3	4	
			Persentase terpenuhinya harapan penugasan Badan	80%	100%	
			Tingkat kesesuaian pelaksanaan pemeriksaan dengan SPKN, PMP dan Kode Etik	80%	100%	
			Pelaksanaan pemeriksaan sesuai RKP	90%	100%	
			Ketepatan waktu pemeriksaan	90%	100%	
			Kesesuaian pemeriksaan dengan sistem pengendalian mutu pemeriksaan	90%	100%	
			Persentase rekomendasi yang telah ditindaklanjuti <i>auditee</i>	50%	90%	
			Persentase pemeriksaan kinerja	10%	30%	
			Persentase laporan pemantauan kerugian negara yang disampaikan tepat waktu	60%	100%	
			Cakupan pemantauan kerugian negara	60%	100%	
			Rasio nilai temuan yang berpengaruh terhadap keuangan negara	3	7	
Persentase deviasi realisasi biaya pemeriksaan terhadap RKP	20%	5%				

KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

NO	PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
II	PROGRAM PENINGKATAN MUTU KELEMBAGAAN, APARATUR DAN PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA	Meningkatnya mutu perencanaan dan pelaporan pemeriksaan, serta terpenuhinya perangkat lunak dan terselenggaranya diklat yang berbasis kompetensi	Persentase Satker yang pencapaian skor BSC-nya minimum 80	80%	100%	554,6
			Ketepatan waktu penyampaian draft RKT	Juni	Juni	
			Tingkat kehandalan pengukuran dan evaluasi kinerja Satker	80%	100%	
			Persentase pemanfaatan rekomendasi hasil pengukuran dan evaluasi kinerja Satker	60%	100%	
			Tingkat pemenuhan perencanaan inisiatif strategis	90%	100%	
			Tingkat pemenuhan pelaksanaan inisiatif strategis	80%	100%	
			Indeks kepuasan pemilik kepentingan atas IHPs	4	4	
			Tingkat pemenuhan kebutuhan pemeriksa dari luar BPK sesuai kebutuhan BPK	100%	100%	
			Tingkat pemanfaatan hasil evaluasi atas LHP	100%	100%	
			Jumlah bahan pendapat yang diterbitkan	4	30 ^{KJ}	
			Indeks kepuasan pengguna atas produk kelitbangan yang ada	3	4	
			Persentase PL yang disusun dan ditetapkan	70%	95%	
			Persentase jumlah SOP yang telah diselesaikan dibandingkan dengan rencana	70%	95%	
			Persentase penyelesaian tugas kajian yang diberikan oleh Badan	100%	100%	
			Persentase jumlah pertimbangan yang dapat diakomodasi Badan	70%	95%	
			Persentase pegawai yang memenuhi standar nilai kelulusan yang dipersyaratkan	100%	100%	
			Indeks Kepuasan Pengguna	3.5	4	
			Jumlah komplain atas ketidakbenaran informasi kalender diklat & website Pusdiklat yang disajikan	0	0	
			Rata - rata penilaian peserta atas penyelenggaraan diklat	3.4	3.8	
			Persentase modul yang disempurnakan	100%	100%	
Jumlah jam pelatihan per instruktur	18 Jam	28 Jam				

KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

NO	PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
			Jumlah kegiatan dalam rangka melaksanakan kerjasama yang sudah disetujui	4	30 ^{KJ}	
			Persentase penyelesaian kurikulum yang berbasis kompetensi	100%	100%	
III	PROGRAM KEPANITERAAN KERUGIAN NEGARA/DAERAH, PENGEMBANGAN DAN PELAYANAN HUKUM DI BIDANG PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA	Meningkatnya pengelolaan kepaniteraan kerugian negara/daerah serta terpenuhinya peraturan perundangan dan pelayanan hukum di bidang pemeriksaan keuangan negara	Persentase jumlah komplain atas pendapat hukum	5%	2%	135,6
			Rata-rata waktu penyelesaian konsep pertimbangan kerugian Negara/Daerah	18 Hari	18 Hari	
			Persentase penyelesaian pendapat hukum atas temuan pemeriksaan	80%	100%	
			Rata-rata waktu penyelesaian pemberian pendapat hukum	21 Hari	21 Hari	
			Persentase penyelesaian konsep/pertimbangan kerugian Negara/Daerah	80%	100%	
			Persentase ketepatan waktu penyampaian kompilasi laporan pemantauan kerugian Negara/Daerah kepada Direktorat EPP	100%	100%	
			Tingkat pemenuhan penyusunan rancangan/konsep produk hukum BPK	70%	95%	
			Jumlah peraturan perundangan yang sudah diusulkan kepada MK/MA untuk dilakukan <i>Judicial Review</i> dan Fatwa	2	20 ^{KJ}	
			Persentase tingkat penyelesaian usulan <i>Judicial Review</i> dan Fatwa	100%	100%	
			Tingkat pemenuhan atas permintaan perlindungan hukum	100%	100%	
			Tingkat efektifitas perlindungan hukum	90%	100%	
			Jumlah komplain atas pelayanan informasi hukum	10	1	
			Tingkat pemenuhan penyusunan peraturan BPK yang terkait dengan tugas dan wewenang BPK	70%	95%	
			Tingkat ketepatan waktu penyelesaian proses penyusunan rancangan peraturan BPK di bidang pemeriksaan keuangan negara	80%	100%	
			Tingkat pemenuhan bantuan hukum	100%	100%	

KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

NO	PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
IV	PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA BPK	Meningkatnya efektivitas dan efisiensi pengelolaan sumber daya dalam rangka terwujudnya organisasi prima	Tingkat pemenuhan kebutuhan Badan	100%	100%	6.509,9
			Persentase diterimanya usulan konsep pidato	100%	100%	
			Persentase pelayanan protokol	70%	100%	
			Persentase tersedianya bahan sidang Badan secara tepat waktu	60%	100%	
			Persentase ketepatan pendistribusian hasil sidang Badan	100%	100%	
			Persentase pelaksanaan rapat	60%	100%	
			Indeks kepuasan pemilik kepentingan atas informasi tentang BPK dan implementasi kerjasama	4	4	
			Persentase jumlah komplain yang ditindaklanjuti	70%	100%	
			Tingkat ketersediaan informasi ke-BPK-an	80%	100%	
			Jumlah peliputan pemberitaan tentang BPK oleh media	29	42	
			Persentase pengaduan yang selesai ditindaklanjuti	50%	100%	
			Frekuensi pertemuan dengan lembaga lain dan media	32	50	
			Jumlah kerjasama yang disetujui	3	25 ^{KJ}	
			Persentase pemenuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan	95%	100%	
			Persentase pegawai yang memenuhi standar kompetensi yang dipersyaratkan	60%	100%	
			Persentase realisasi penempatan dibandingkan rencana penempatan pegawai	100%	100%	
			Jangka waktu pengisian jabatan kosong			
			Persentase rencana pengembangan individual yang disusun	80%	100%	
			Jumlah jalur karir yang tersedia bagi pegawai	2	6	
			Persentase kesalahan dalam penyajian informasi pegawai	10%	0%	
			Persentase pegawai yang memiliki data yang tidak lengkap	0%	0%	
			Jenis opini laporan keuangan tahunan BPK	WTP	WTP	
			Tingkat kepatuhan laporan keuangan terhadap SAP	100%	100%	
Tingkat pemenuhan anggaran BPK	90%	99%				
Tingkat penyerapan anggaran	85%	99%				

KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

NO	PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
			Tingkat kesesuaian proses pelaksanaan anggaran dengan SOP	80%	100%	
			Persentase deviasi realisasi biaya pemeriksaan terhadap RKP	10%	2%	
			Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti	85%	100%	
V	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR BPK	Meningkatnya efektivitas dan efisiensi pengelolaan sarana dan prasarana, teknologi informasi dan komunikasi serta arsip	Indeks Kepuasan Pemilik Kepentingan	3	4	3.521,7
			Persentase bisnis proses yang telah memanfaatkan teknologi Informasi dan komunikasi	70%	95%	
			Persentase kesesuaian realisasi pengembangan aplikasi dengan rencana	70%	95%	
			Persentase kesesuaian rancangan aplikasi dengan kebutuhan satker	75%	95%	
			Persentase ketersediaan infrastruktur TI di seluruh kantor BPK	100%	100%	
			Persentase keluhan yang dapat diselesaikan	75%	95%	
			Persentase penyelesaian pertimbangan dan persetujuan jadwal retensi dan penghapusan arsip keuangan negara yang diajukan oleh instansi	90%	100%	
			Indeks kepuasan pegawai atas ketersediaan sarana dan prasarana kerja	3.5	4	
			Opini LK tahunan	WTP	WTP	
			Ketepatan waktu penyelesaian jadwal penyelesaian retensi dan penghapusan arsip keuangan negara	90%	100%	
			Tingkat pemenuhan gedung kantor, rumah dinas, Kendaraan, dan fasilitas kantor di kantor pusat	75%	95%	
			Ketepatan waktu pencetakan IHPS	3		
			Kesesuaian pengelolaan SA BMN dengan peraturan yang berlaku	80%	100%	
			Pemanfaatan BMN sesuai dengan kebutuhan	80%	100%	

KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

NO	PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
VI	PROGRAM PENGAWASAN DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS APARATUR BPK	Terlaksananya sistem pengendalian mutu, serta meningkatnya efektivitas penanganan pelanggaran kode etik dan disiplin pegawai	Tingkat kepatuhan terhadap peraturan dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP)	80%	100%	95,7
			Tingkat kesesuaian pelaksanaan pemeriksaan dengan SPKN dan PMP	80%	100%	
			Tingkat kesesuaian antara rekomendasi dengan tindak lanjut	80%	100%	
			Pertimbangan yang dimanfaatkan untuk penyempurnaan sisdur	100%	100%	
			Tingkat pemanfaatan hasil <i>review</i> untuk penyempurnaan konsep laporan keuangan BPK	100%	100%	
			Waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan review konsep laporan keuangan	25 Hari	25 Hari	
			Tenggang waktu antara diterimanya pengaduan sampai dengan penyerahan ke MKKE	5 Hari	5 Hari	
			Persentase pemberkasian terhadap pelanggaran disiplin pegawai yang diserahkan ke Biro SDM	100%	100%	
			Tenggang waktu diterimanya data pelanggaran sampai dengan penyerahan hasil	35 Hari	25 Hari	
			Persentase penyerapan anggaran satker	80%	100%	
TOTAL ALOKASI BPK 2010-2014						14.794,4

K : Angka kumulatif 5 tahun (2010-2014)

**RENCANA TINDAK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH 2010-2014
PER KEMENTERIAN/LEMBAGA**

KEMENTERIAN/LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG

NO	PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
1	Program Penyelesaian Perkara	Percepatan peningkatan penyelesaian perkara Tingkat Pertama, Banding, Kasasi dan PK.	<ul style="list-style-type: none"> · Penyelesaian tunggakan perkara dapat dilakukan dengan cepat. · Penyelesaian mutasi perkara yg tepat waktu. · Penurunan tunggakan perkara · Terwujudnya lembaga peradilan yang dihormati dan disegani oleh setiap warga negara dengan diterapkannya sistem peradilan yang sederhana, cepat, transparan dan akuntabel 			450,7
1.1	Kegiatan : Percepatan peningkatan penyelesaian perkara	Terselesaikannya penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel	<ul style="list-style-type: none"> · Jumlah penyelesaian perkara termasuk perkara-perkara yang menarik perhatian masyarakat (perkara KKN dan HAM) · Jumlah penyelesaian mutasi perkara yg tepat waktu. · Terselenggaranya pengelolaan informasi administrasi perkara secara akurat, efektif dan efisien · Tersedianya biaya penyelesaian perkara yang memadai 	10.000 pkr	51.400 pkr ^{K3)}	146,9
2	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Terselesaikannya penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel di lingkungan Peradilan Umum	<ul style="list-style-type: none"> · Peningkatan jumlah penyelesaian perkara · Peningkatan penyelesaian proses administrasi perkara · Penyediaan Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan · Penyediaan <i>Zitting Platz</i> dan pelaksanaan sidang keliling untuk memberikan akses kepada masyarakat terhadap keadilan 			799,3

KEMENTERIAN/LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG

NO	PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
2.1	Kegiatan: Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan penyelesaian dan penanganan perkara	<ul style="list-style-type: none"> · Jumlah penyelesaian administrasi perkara (yang sederhana, dan tepat waktu) di tingkat Pertama dan Banding di lingkungan Peradilan Umum · Jumlah Penyelesaian Perkara yang kurang dari 6 (enam) bulan · Jumlah penyampaian berkas perkara Kasasi, PK dan Grasi yang lengkap dan tepat waktu · Penyusunan kebijakan mengenai manajemen dan tata laksana di lingkungan Peradilan Umum 	145.000 pkr	746.250 pkr ^{KJ}	320,2
2.2	Kegiatan: Penyediaan dana bantuan hukum di Pengadilan Tingkat Pertama	Penyelesaian perkara pidana bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	<ul style="list-style-type: none"> · Jumlah Penyediaan dana bantuan hukum di Pengadilan Tingkat Pertama · Kebijakan mengenai bantuan hukum bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan · Jumlah Pembangunan atau perbaikan fungsi operasionalisasi <i>Zitting Plaatz</i> dan pelaksanaan sidang keliling untuk menjangkau segenap lapisan masyarakat 	33.960 pkr	174.785 pkr ^{KJ}	174,7
2.3	Kegiatan: Pengembangan kebijakan Peradilan Tipikor	Terlaksananya peradilan Tipikor di tiap provinsi di lingkungan peradilan umum	Tersusunnya kebijakan mengenai penyelenggaraan/tata laksana peradilan Tipikor	6 lokasi	30 lokasi ^{KJ}	3,0
3	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Terselesaikannya penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel di lingkungan Peradilan Agama	<ul style="list-style-type: none"> · Peningkatan jumlah penyelesaian perkara · Peningkatan penyelesaian proses administrasi perkara · Penyediaan <i>Zitting Plaatz</i> dan pelaksanaan sidang keliling untuk memberikan akses kepada masyarakat terhadap keadilan 			274,1

KEMENTERIAN/LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG

NO	PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
3.1	Kegiatan: Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Peningkatan penyelesaian dan penanganan perkara	· Jumlah penyelesaian administrasi perkara (yang sederhana, dan tepat waktu) di tingkat Pertama dan Banding di lingkungan Peradilan Agama	80.000 pkr	411.600 pkr ^{KJ}	102,8
			· Jumlah Penyelesaian Perkara yang kurang dari 6 (enam) bulan			
			· Jumlah penyampaian berkas perkara Kasasi, PK dan Kesyariahan yang lengkap dan tepat waktu			
		· Penyusunan kebijakan mengenai manajemen dan tata laksana di lingkungan Peradilan Umum				
3.2	Kegiatan: Penyediaan dana bantuan hukum di Pengadilan Agama	Penyelesaian perkara peradilan agama bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	· Penyediaan dana prodeo di Pengadilan Tingkat Pertama	372 satker	1.924 satker ^{KJ}	102,7
			· Mengoptimalkan fungsi pelaksanaan sidang keliling untuk menjangkau segenap lapisan masyarakat			
4	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan TUN	Terselesaikannya penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel di lingkungan Peradilan Militer dan TUN	· Peningkatan jumlah penyelesaian perkara · Peningkatan penyelesaian proses administrasi perkara · Penyediaan dana pelaksanaan sidang keliling (hakim terbang) untuk memberikan akses kepada masyarakat terhadap keadilan			81,7
4.1	Kegiatan: Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan TUN	Peningkatan penyelesaian dan penanganan perkara	· Jumlah penyelesaian administrasi perkara (yang sederhana, dan tepat waktu) di tingkat Pertama dan Banding di lingkungan Peradilan Peradilan Militer dan TUN	5,000 pkr	25.731 pkr ^{KJ}	26,0
			· Jumlah Penyelesaian Perkara yang kurang dari 6 (enam) bulan			
			· Jumlah penyampaian berkas perkara Kasasi, PK dan Grasi yang lengkap dan tepat waktu			
			· Penyusunan kebijakan mengenai manajemen dan tata laksana di lingkungan Peradilan Umum			

KEMENTERIAN/LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG

NO	PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
4.2	Kegiatan: Penyediaan dana bantuan hukum di Pengadilan Militer dan TUN	Penyelesaian perkara peradilan Militer dan TUN di wilayah yang belum terjangkau peradilan Militer dan TUN	· Kebijakan mengenai bantuan hukum bagi masyarakat di wilayah yang belum terjangkau peradilan Militer dan TUN	124 pkr	639 ^{KJ}	639,0
			· Pelaksanaan sidang keliling (hakim terbang) untuk menjangkau segenap lapisan masyarakat	23 satker	115 ^{KJ}	26,0
5	Program Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya MA-RI	Tersedianya dukungan manajemen dan tugas teknis dalam penyelenggaraan fungsi peradilan	Tersedianya dukungan manajemen dan tugas teknis dalam penyelenggaraan fungsi peradilan			21.687,0
5.1	Kegiatan: Pembinaan Administrasi pengelolaan kepegawaian dan pengembangan SDM.	· Jumlah kebijakan/pedoman tentang sistem rekrutmen, pola karir, sistem promosi dan mutasi, aparat penegak hukum yang berbasis merit, transparan dan akuntabel	· Jumlah rekrutmen yang transparan, adil, akuntabel dan berdasarkan kompetensi	802 satker	4058 satker	25,7
		· Tersedianya data informasi terpusat mengenai sumber daya manusia aparat penegak hukum yang dapat digunakan dalam pengambilan kebijakan mutasi, promosi dan sebagainya	· Jumlah rekrutmen Hakim Adhoc Tipikor			
		· Tersedianya informasi seleksi yang transparan dan akuntabel kepada masyarakat	· Persentase Database kepegawaian kesekretariatan, diklat, dan pengawasan terintegrasi.			
			· Jumlah dokumen rencana kerja pengelolaan rekrutmen yang berisi proses, metode dan tahap rekrutmen.			
			· Tersedianya dokumen rancangan pola karir			
			· Tersedianya dokumen rekomendasi perbaikan pola karir			
			· Tersedianya dokumen rencana kerja pelaksanaan perbaikan pola karir.			
6	Program Sarana dan Prasarana Aparatur Negara MA-RI		· Persentase penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung penyelenggaraan peradilan			5.273,8
			· Penyelenggaraan peradilan berbasis teknologi informasi			

KEMENTERIAN/LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG

NO	PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
6.1	Kegiatan : Pembinaan Administrasi Pengelolaan Perlengkapan Sarana dan Prasarana di lingkungan MA dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya	• Tersedianya dokumentasi analisa data pemenuhan kebutuhan Sarana dan Prasarana di lingkungan MA dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya	· Dokumen analisa data pemenuhan kebutuhan Sarana dan Prasarana di lingkungan MA dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya	802 satker	814 satker	23,0
6.2	Kegiatan : Pengadaan Sarana dan Prasarana di lingkungan MA	Tersedianya sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan peradilan di lingkungan MA	Jumlah penyediaan sarana dan prasarana di lingkungan MA Pusat	7 satker	7 satker	566,3
6.3	Kegiatan : Pengadaan Sarana dan Prasarana di lingkungan peradilan tingkat banding dan tingkat pertama	Tersedianya sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan peradilan tingkat banding dan tingkat pertama.	Jumlah pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana teknis dan umum peradilan tingkat banding dan tingkat daerah.	Pengad.tanah 100.000 m2 Pemb.ged baru 25 unit Pemb.lanjutan 48 unit Pemb.rumah dinas 19 unit Rehab ged 90 unit Reha rumah dinas 43 unit Sarana dan prasarana 795 satker -	Penga.tanah 500.000 m2 ^{KJ} Pemb.ged. Baru 175 unit ^{KJ} Pemb.lanjutan 298 unit ^{KJ} Pemb.rumah dinas 149 unit ^{KJ} Rehab ged 450 unit ^{KJ} Reha rumah dinas 265 unit ^{KJ} Sarana dan prasarana 795 satker Pengad kend roda empat utk 1.800 unit utk wkl dan pansek pengadilan tkt ^{KJ}	4.270,5

KEMENTERIAN/LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG

NO	PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITYAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
			Penyediaan sarana dan prasarana pengadilan tipikor termasuk tunjangan hakim adhoc Tipikor (di dalamnya termasuk tunjangan kesehatan dan keamanan)	Penyediaan Sarana prasarana dan tunjangan hakim adhoc di 7 PN di ibukota propinsi	Penyediaan Sarana prasarana dan tunjangan hakim adhoc di 340 PN di ibukota kabupaten/kota	
			Penyediaan sarana dan prasarana untuk mendukung penyelenggaraan Zitting Plaatz	64 lokasi	320 lokasi	
7	Program Pendidikan dan Pelatihan	Tersedianya sumber daya aparatur hukum yang profesional dan kompeten dalam melaksanakan penyelenggaraan peradilan	Terlaksananya sistem Diklat dan Litbang sesuai dengan kebutuhan dalam penyelenggaraan peradilan			369,1
7.1	Kegiatan: Peningkatan Profesionalitas Tenaga Teknis Peradilan dan Aparatur Peradilan di bidang Manajemen dan Kepemimpinan	Tersedianya sumber daya aparatur hukum yang profesional dan kompeten dalam melaksanakan penyelenggaraan peradilan	<ul style="list-style-type: none"> · Jumlah SDM yang sudah mendapatkan pelatihan teknis peradilan dan Manajemen dan Kepemimpinan yang memenuhi standar kompetensi, tugas dan kinerja · Jumlah pelatihan bagi Hakim/Hakim Adhoc dan tenaga teknis lainnya mengenai Tipikor, asset recovery dll · Jumlah kurikulum, silabus, materi ajar yang dikembangkan berdasarkan kebutuhan pelatihan (needs-based curriculum) · Jumlah pengembangan sistem diklat yang terhubung dengan sistem rekrutmen, sistim pengawasan dan sistim karir bagi hakim dan aparatur peradilan 	3826 org	34.306 org	203,5
7.2	Kegiatan: Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan		<ul style="list-style-type: none"> · Jumlah kegiatan-kegiatan penelitian dan pengembangan hukum dan peradilan dengan mempertimbangkan kebutuhan lembaga peradilan dan rekomendasi unit kerja lainnya. 	6 wil prop	50 wil prop	25,8

KEMENTERIAN/LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG

NO	PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITYAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
			<ul style="list-style-type: none"> · Jumlah sistim penelitian dan pengembangan · Jumlah <i>assessment</i> keterkaitan antara sistim diklat, dengan sistim rekrutmen, sistim karir bagi hakim dan aparaturnya pengadilan dan sistim pengawasan 	30 audience	150 audience ^{K)}	
				9 kajian	45 kajian ^{K)}	
8	Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara MA-RI	Terlaksananya mekanisme pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan	Penyelenggaraan peradilan yang bebas dari praktek-praktek KKN			123,5
8.1	Pengawasan pelaksanaan teknis, administrasi peradilan, administrasi umum, penanganan pengaduan	Penanganan pengaduan masyarakat secara transparan, akuntabel, efektif dan efisien	<ul style="list-style-type: none"> · Jumlah penanganan pengawasan teknis, administrasi peradilan dan administrasi umum, serta penanganan pengaduan di Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya · Jumlah sosialisasi Sistem pengelolaan pengaduan kepada aparat pengadilan dan masyarakat. 	204 laporan	1.049 laporan ^{K)}	66,8
8.2	Pengawasan dan pemeriksaan kinerja serta perilaku aparat Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya.	Meningkatnya kualitas kinerja hakim dan aparat peradilan dan kepercayaan publik kepada lembaga peradilan.	Jumlah laporan pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan kinerja serta perilaku hakim dan aparat peradilan.	100 laporan	500 laporan ^{K)}	10,5
TOTAL ALOKASI MAHKAMAH AGUNG 2010-2014						29.059,2

K : Angka kumulatif 5 tahun (2010-2014)

**RENCANA TINDAK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH 2010-2014
PER KEMENTERIAN/LEMBAGA**

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEJAKSAAN AGUNG

NO.	PROGRAM / KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp. Miliar)
				2010	2014	
1.	Program Dukungan Manajemen & Pelaksanaan Tugas Teknis Kejaksaan RI	Meningkatnya kemampuan profesional di bidang SDM, keuangan, informasi, data peraturan perundang-undangan	Tercapainya dukungan manajemen SDM, keuangan, informasi, data peraturan perundang-undangan			7.562,5
1.1	Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kejaksaan	Meningkatnya kemampuan profesional, integritas kepribadian dan disiplin di lingkungan Kejaksaan.	Jumlah pendidikan dan pelatihan baik penjenjangan maupun fungsional	35	185 ^{K)}	420,1
1.2	Pembinaan dan Pengelolaan Kepegawaian, di Kejakung, Kejati, Kejari dan Cabjari.	Meningkatnya kualitas Pembinaan kepegawaian meliputi rekrutmen pegawai, jenjang karier dan mutasi pegawai;	Jumlah dokumen Blue Print mengenai rekrutmen pegawai, pola jenjang karier dan mutasi pegawai.	-	3 dok blueprint	8,6
			Jumlah kegiatan manajemen kepegawaian	6 keg	6 keg	
1.3	Sistem Informasi Manajemen	Tersedianya basis data yang dapat menyajikan informasi data perkara secara akurat, cepat dan lengkap dalam rangka mewujudkan penanganan perkara secara cepat dan akuntabel serta dapat diakses oleh masyarakat;	Jumlah kegiatan pendataan perkara yang disajikan berdasarkan jenis penanganan perkara termasuk jenis perkara KDRT, perkara anak dan perkara lainnya (statistik kriminal).	1 keg	1 keg	151,9
			Jumlah Kegiatan Penunjang Operasional Simkari-2	4 keg	22 keg ^{K)}	
1.4	Pelayanan Penyusunan Peraturan Perundang – Undangan dan kerjasama hukum	Meningkatnya Pemberian pertimbangan hukum kepada satuan organisasi Kejaksaan dan instansi pemerintah, serta turut melakukan penelaahan dan penyusunan perumusan peraturan perundang-undangan dan pembinaan hubungan dengan lembaga negara, lembaga pemerintah dan lembaga lain baik di dalam maupun di luar negeri.	Jumlah kegiatan kerja sama hukum untuk penyusunan kesepakatan MLA rangka penelusuran dan pengembalian aset negara hasil tindak pidana korupsi yang disembunyikan diluar negeri.	7 keg	45 keg ^{K)}	8,6

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEJAKSAAN AGUNG

NO.	PROGRAM / KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp. Miliar)
				2010	2014	
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kejaksaan	Terpenuhinya dukungan sarana dan prasarana dalam rangka menunjang tugas pokok dan fungsi Kejaksaan RI	Persentase penyediaan sarana dan prasarana dalam rangka menunjang tugas pokok dan fungsi Kejaksaan RI			3.074,2
3.	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kejaksaan	Meningkatnya kinerja aparatur Kejaksaan	Terlaksananya pengawasan pelaksanaan tugas dan wewenang aparatur Kejaksaan			79,6
3.1	Kegiatan Peningkatan Pengawasan Bidang Tindak Pidana Umum	Meningkatnya kualitas pengawasan atas pelaksanaan tugas rutin dan pembangunan semua unsur Kejaksaan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung.	Jumlah laporan pengaduan masyarakat terhadap penyalahgunaan wewenang dalam penanganan perkara tindak pidana umum yang ditindaklanjuti	100 lapdu	2100 lapdu ^{K)}	33,1
3.2	Peningkatan Pengawasan Bidang Intelijen	Meningkatnya kualitas pengawasan atas pelaksanaan tugas rutin dan pembangunan semua unsur Kejaksaan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung.	Jumlah laporan pengaduan masyarakat terhadap penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan kegiatan operasi intelijen yang ditindaklanjuti	30 lapdu	830 lapdu ^{K)}	13,0
3.3	Peningkatan Pengawasan Bidang Pidana Khusus, Perdata dan Tata Usaha Negara	Meningkatnya kualitas pengawasan atas pelaksanaan tugas rutin dan pembangunan semua unsur Kejaksaan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung.	Jumlah laporan pengaduan masyarakat terhadap penyalahgunaan wewenang dalam penanganan perkara pidana khusus, tindak pidana korupsi dan perkara perdata dan tata usaha negara yang ditindaklanjuti	10 lapdu	810 lapdu ^{K)}	12,8
3.4	Peningkatan Pengawasan Aparatur Kejaksaan oleh Kejati dan jajaran pengawasan di daerah	Meningkatnya kualitas pengawasan atas pelaksanaan tugas rutin dan pembangunan semua unsur Kejaksaan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung.	Jumlah laporan pengaduan masyarakat terhadap penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh seluruh aparat Kejaksaan, baik di Kejati dan jajaran pengawas di daerah yang ditindaklanjuti	10 lapdu	610 lapdu ^{K)}	7,4
4.	Program Penanganan Dan Penyelesaian Perkara Pidana Khusus, Pelanggaran HAM yang Berat dan Perkara Tindak Pidana Korupsi	Meningkatnya penyelesaian Perkara Pidana Khusus, Pelanggaran HAM yang Berat dan Perkara Tindak Pidana Korupsi	Terselesaikannya penanganan Perkara Pidana Khusus, Pelanggaran HAM yang Berat dan Perkara Tindak Pidana Korupsi secara cepat, tepat dan akuntabel			989,8

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEJAKSAAN AGUNG

NO.	PROGRAM / KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp. Miliar)
				2010	2014	
4.1	Penanganan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi	Meningkatnya penyelesaian perkara tindak pidana korupsi secara cepat, tepat dan akuntabel.	Jumlah Penyidikan perkara tindak pidana Korupsi yang diselesaikan	145 pkr	725 pkr ^{K)}	53,3
4.2	Penanganan Penyidikan Pelanggaran HAM yang Berat	Meningkatnya penyelesaian penanganan perkara pelanggaran HAM yang berat secara cepat, tepat dan akuntabel.	Jumlah penyidikan perkara pelanggaran HAM yang berat yang diselesaikan	10 pkr	30 pkr ^{K)}	0,8
4.3	Peningkatan Penuntutan	Meningkatnya penyelesaian perkara pidana khusus, tindak pidana korupsi dan pelanggaran HAM yang berat secara cepat, tepat dan akuntabel.	- Jumlah perkara tindak pidana korupsi yang diselesaikan dalam tahap Penuntutan.	145 pkr	545 pkr ^{K)}	19,5
			- Jumlah perkara pelanggaran HAM yang berat yang diselesaikan dalam tahap Penuntutan.	5 pkr	25 pkr ^{K)}	
4.4	Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus lainnya di Kejati, Kejari dan Cabjari.	Meningkatnya penyelesaian perkara pidana khusus, dan tindak pidana korupsi secara cepat, tepat dan akuntabel yang dilaksanakan oleh jajaran Kejaksaan di daerah.	- Jumlah perkara tindak pidana korupsi yang diselesaikan oleh Kejati, Kejari dan Cabjari.	1700 pkr	7300 pkr ^{K)}	736,8
5.	Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum	Meningkatnya penyelesaian Perkara Pidana Umum	Terselesaikannya penanganan Perkara Pidana Umum secara cepat, tepat dan akuntabel			1.835,3
6.	Program Penyelidikan / Pengamanan / Penggalangan Kasus Intelijen	Meningkatnya penyelesaian Penyelidikan / Pengamanan / Penggalangan Kasus Intelijen	Terselesaikannya penanganan Penyelidikan / Pengamanan / Penggalangan Kasus Intelijen secara cepat, tepat dan akuntabel			124,1
7.	Program Penanganan Dan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara	Meningkatnya penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara	Terselesaikannya penanganan Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara secara cepat, tepat dan akuntabel			148,7
TOTAL ALOKASI KEJAKSAAN AGUNG 2010-2014						13.814,2

K : Angka kumulatif 5 tahun (2010-2014)

**RENCANA TINDAK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH 2010-2014
PER KEMENTERIAN/LEMBAGA**

KEMENTERIAN/LEMBAGA: SEKRETARIAT NEGARA

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp. Miliar)
			2010	2014	
I. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA SEKRETARIAT NEGARA					7.429,8
	1 Terselenggaranya perencanaan dan pelaksanaan anggaran secara transparan dan akuntabel serta pelayanan ketatausahaan dan kearsipan Sekretariat Negara	1 Persentase tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan yang disusun sesuai dengan standar pelayanan 2 Persentase ketepatan dalam pelayanan pelaksanaan anggaran sesuai standar pelayanan 3 Persentase pelayanan penatausahaan surat kepada Presiden dan Mensesneg sesuai dengan standar pelayanan 4 Persentase penyelesaian pencetakan dokumen Sekretariat Negara sesuai dengan standar pelayanan	100%	100%	
	2 Terselenggaranya pembinaan dan pengembangan SDM Sekretariat Negara, pelayanan administrasi pejabat negara, penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan, serta pelayanan kehumasan di lingkungan Sekretariat Negara	1 Persentase penyelesaian pelayanan administrasi kepegawaian di lingkungan Sekretariat Negara dan administrasi pejabat negara sesuai dengan standar pelayanan 2 Persentase pegawai/pejabat Sekretariat Negara yang menempati jabatan sesuai dengan standar kompetensi jabatan 3 Persentase penyelesaian pelaksanaan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan, serta penyelenggaraan pelayanan kehumasan sesuai dengan standar pelayanan 4 Persentase pejabat/pegawai yang telah mendapatkan pendidikan dan pelatihan sesuai dengan kompetensi	100%	100%	
	3 Terwujudnya dukungan manajemen dan pelayanan kerumahtanggaan yang prima	1 Persentase pelayanan kerumahtanggaan yang telah distandarisasi	100%	100%	

KEMENTERIAN/LEMBAGA: SEKRETARIAT NEGARA

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp. Miliar)
			2010	2014	
		2 Persentase pelaksanaan pelayanan kerumahtanggaan yang sesuai dengan standar	100%	100%	
	4 Terwujudnya dukungan manajemen dan pelayanan kerumahtanggaan yang prima	1 Persentase pelayanan keprotokolan yang telah distandarisasi 2 Persentase pelaksanaan pelayanan keprotokolan yang sesuai dengan standar	100% 100%	100% 100%	
	5 Terwujudnya penyelenggaraan pelayanan administrasi dan kerumahtanggaan di lingkungan Sekretariat Wakil Presiden yang efektif	Persentase Penyelenggaraan bidang keprotokolan, media massa, penerjemahan, pengelolaan naskah pidato dan notulen, administrasi umum dan ketatausahaan sesuai standar	80%	90%	
	6 Terwujudnya penyelenggaraan pelayanan bidang administrasi umum di lingkungan Sekretariat Militer	Persentase pelayanan bidang administrasi umum di lingkungan Sekretariat Militer yang dilaksanakan secara efektif dan efisien	85%	100%	
	7 Meningkatnya kualitas pelayanan publik dalam bidang olahraga maupun non olah raga kepada seluruh stakeholder PPKGBK	1 Sarana Prasarana olahraga maupun non olahraga yang memenuhi kualitas standar 2 jumlah penyewa sarana dan prasarana di lingkungan PPKGBK 3 Pelayanan yang diberikan PPKGBK	5 VNU 80% 80%	9 VNU 90% 90%	
	8 Beroperasinya fungsi operasional dan pemeliharaan perkantoran	Persentase beroperasinya pemeliharaan perkantoran dan pemeliharaan kawasan Kemayoran	100%	100%	
	9 Kesiapan bahan wicara sidang kabinet	1 Kecepatan penyiapan bahan wicara sidang kabinet	2 hari	2 hari	
	10 Kelancaran distribusi hasil sidang kabinet	2 Ketepatan penyiapan bahan wicara sidang kabinet 3 Kecepatan distribusi risalah sidang kabinet 4 Ketepatan distribusi risalah sidang kabinet	90% 3 hari 90%	90% 3 hari 90%	

KEMENTERIAN/LEMBAGA: SEKRETARIAT NEGARA

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp. Miliar)
			2010	2014	
	11 Akurasi dan proses penyelesaian Keputusan Presiden mengenai pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan pemerintah dan kepangkatan pensiun Pegawai Negeri Sipil yang menjadi wewenang Presiden	1 Kecepatan penyelesaian pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan pemerintahan dan kepangkatan Pegawai Negeri Sipil yang menjadi wewenang Presiden	30 hari	12 hari	
	12 Kecepatan penyediaan data/informasi dan aksesibilitas stakeholders	2 Ketepatan penyelesaian pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan pemerintahan dan kepangkatan Pegawai Negeri Sipil yang menjadi wewenang Presiden	95%	98%	
		3 Kecepatan penyediaan data dan aksesibilitas <i>stakeholders</i> terhadap informasi yang dihasilkan Sekretariat Kabinet	1 hari	1 hari	
	13 Peningkatan kualitas bidang intelejen, operasi, personil, dan dukungan umum logistik	Jumlah kegiatan dan kekuatan personel	85%	100%	
	14 Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya yang dicapai	1 Persentase data dan informasi yang ditindaklanjuti oleh anggota Dewan Pertimbangan Presiden	100%	100%	
		2 Persentase pelayanan keprotokolan dan persidangan di lingkungan Dewan Pertimbangan Presiden sesuai Standar Pelayanan	100%	100%	
	15 Seluruh kegiatan operasional ORI dapat berjalan lancar	Seluruh kebutuhan pendanaan bagi ORI dapat terpenuhi sesuai jadwal			
	16 Terselenggaranya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis Sekretariat Negara	Adanya rekomendasi kebijakan pembaharuan hukum yang ditujukan kepada Presiden	100%	100%	
	17 Tersusunnya pendapat, saran, dan pertimbangan atas prakarsa sendiri atau permintaan mengenai penguasaan, pengembangan, dan pemanfaatan iptek kepada pemerintah serta masyarakat untuk mencapai tujuan nasional	Rekomendasi, memorandum, fatwa, pandangan, pendapat, saran, pertimbangan, atas prakarsa sendiri dan atau permintaan mengenai penguasaan, pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang ilmu pengetahuan dasar, ilmu kedokteran, ilmu rekayasa, ilmu sosial, dan kebudayaan kepada pemerintah & masyarakat	100%	100%	
	18 Terlaksananya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis Sekretariat Negara	Meningkatkan hasil pemantauan dan evaluasi	100%	100%	

KEMENTERIAN/LEMBAGA: SEKRETARIAT NEGARA

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp. Miliar)
			2010	2014	
II. PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR SEKRETARIAT NEGARA					3.249,4
	1 Terselenggaranya dukungan pelayanan umum kepada pejabat negara dan aparatur Setneg yang berstandar kualitas baik serta perawatan dan pengelolaan aset/BMN Sekretariat Negara	1. Persentase ketersediaan sarana dan prasarana kantor, rumah jabatan pejabat tinggi negara serta wisma sesuai dengan standar yang ditetapkan 2. Persentase BMN yang dilaporkan sesuai dengan ketentuan	100% 100%	100% 100%	
	2 Tersedianya sarana dan prasaran yang berkualitas	Persentase sarana & prasarana dilingkungan Rumah Tangga Kepresidenan yang dapat di operasikan/dimanfaatkan	100%	100%	
	3 Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai di lingkungan Sekretariat Wakil Presiden	1 Persentase Sarana dan Prasarana yang berkualitas sesuai standar pelayanan 2 Persentase Pelayanan kerumahtanggaan yang berkualitas sesuai standar pelayanan	80% 80%	90% 90%	
	4 Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai di lingkungan Sekretariat Militer	Persentase fasilitas kerja yang siap pakai	80%	80%	
	5 peningkatan kualitas dukungan sarana prasarana penunjang tupoksi	terselenggaranya pengadaan alat peralatan, sarana/prasarana fisik lainnya dalam rangka menunjang pelaksanaan tupoksi	85%	100%	
III. PROGRAM PENYELENGGARAAN PELAYANAN DUKUNGAN KEBIJAKAN KEPADA PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN					404,8
	1 Terselenggaranya kerjasama teknik luar negeri yang cepat, tepat dan aman serta terselenggaranya program kerjasama teknik selatan-selatan	1. Persentase dokumen kerjasama teknik luar negeri yang dapat diselesaikan tepat waktu 2. Persentase dokumen penugasan pejabat/pegawai/tenaga Indonesia ke luar negeri dalam rangka dinas dan belajar atas tanggungan negara dan perorangan yang dapat diselesaikan tepat waktu 3. Persentase pelatihan yang dilaksanakan dalam kerangka kerjasama teknik selatan-selatan sesuai dengan dokumen kerjasama	100% 100% 100%	100% 100% 100%	

KEMENTERIAN/LEMBAGA: SEKRETARIAT NEGARA

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp. Miliar)
			2010	2014	
	2 Meningkatnya kualitas analisis dan kecepatan dalam memberikan dukungan kebijakan dalam dan luar negeri, penyiapan bahan dan data dukungan kebijakan, serta dukungan informatika	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase rekomendasi kebijakan dalam dan luar negeri kepada Presiden yang diselesaikan secara akurat dan tepat waktu sesuai standar 2. Persentase rekomendasi kebijakan atas kelayakan permohonan kegiatan/acara-acara Kepresidenan di dalam dan luar negeri secara akurat dan tepat waktu sesuai standar 3. Persentase surat/naskah letter of recall (LR) dan letter of credential (LC) Dubes RI, letter of commission (LC) Konsul/Konjen/Konsul Kehormatan RI, dan penerjemahan naskah/surat resmi kepresidenan/kenegaraan yang diselesaikan secara akurat dan tepat waktu 4. Persentase ketersediaan transkrip dan pointers pidato presiden yang dapat dijadikan sebagai dokumen negara 5. Persentase ketersediaan aplikasi sistem, layanan infrastruktur jaringan, serta layanan data dan informasi dukungan kebijakan yang diselesaikan secara akurat dan tepat waktu sesuai standar 	100%	100%	
	3 Terselenggaranya hubungan kelembagaan yang harmonis dan sinergis antara Presiden/Mensesneg dengan lembaga negara, lembaga daerah, organisasi politik, LSM dan organisasi kemasyarakatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase laporan hasil pertemuan yang difasilitasi dalam hubungan antara Presiden/Mensesneg dengan Lembaga Negara, Lembaga Daerah, Orpol, LSM, dan Ormas sesuai standar pelayanan 2. Persentase rekomendasi berkaitan dengan hubungan kelembagaan yang ditindaklanjuti oleh Presiden/Mensesneg 3. Persentase ketersediaan profil lembaga negara, lembaga daerah, organisasi politik, Lembaga Swadaya Masyarakat, organisasi kemasyarakatan 	100%	100%	

KEMENTERIAN/LEMBAGA: SEKRETARIAT NEGARA

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp. Miliar)
			2010	2014	
	4 Terselenggaranya ijin prakarsa, dan analisa RUU, RPerpu, RPP, penyiapan pertimbangan rancangan Perpres, otentifikasi UU, Perpu, PP, evaluasi pelaksanaan UU, Perpu, PP, dan pendapat hukum serta analisis dan administrasi permasalahan hukum, ratifikasi, prerogratif, naturalisasi, dan perundang-undangan	1. Persentase penyelesaian laporan hasil analisis RUU, RPerpu, RPP dan pertimbangan Rperpres sesuai dengan standar pelayanan 2. Persentase penyelesaian administratif RUU, RPerpu, dan RPP yang akan disampaikan/disahkan/ditetapkan oleh Presiden sesuai dengan standar pelayanan 3. Persentase penyelesaian laporan hasil evaluasi dan penyusunan pendapat hukum pelaksanaan RUU, R Perpu, dan RPP sesuai dengan standar pelayanan 4. Persentase penyelesaian gugatan dan permohonan hak uji materil serta permohonan perlindungan hukum yang ditindaklanjuti 5. Persentase permasalahan dan permohonan grasi, amnesti, abolisi, rehabilitasi, dan remisi perubahan pidana penjara serta naturalisasi yang ditelaah dan diselesaikan	100%	100%	
	5 Tersedianya rekomendasi kebijakan di bidang Politik, Ekonomi, Kesejahteraan Rakyat, dan Dukungan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan kepada Wakil Presiden yang ditindaklanjuti	1. Persentase Rekomendasi kebijakan bidang hubungan internasional, pemerintahan dan politik dalam negeri, pertanian negara, keamanan dan ketertiban, kehakiman, hukum dan HAM, kewilayahan dan wawasan kepada Wakil Presiden yang ditindaklanjuti sesuai standar 2. Persentase Rekomendasi kebijakan bidang moneter dan keuangan perdagangan dan kerjasama internasional, produksi serta prasarana dasar dan energi kepada Wakil Presiden yang ditindaklanjuti sesuai standar 3. Persentase Rekomendasi kebijakan bidang agama dan sosial, pendidikan, kebudayaan dan olahraga, kesehatan, lingkungan hidup dan perumahan rakyat, pemberdayaan perempuan, usaha mikro kecil dan masalah ketenagakerjaan kepada Wakil Presiden yang ditindaklanjuti	80%	90%	

KEMENTERIAN/LEMBAGA: SEKRETARIAT NEGARA

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp. Miliar)
			2010	2014	
		4 Persentase Rekomendasi kebijakan bidang dukungan pengawasan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan otonomi daerah, dukungan pengawasan pembangunan dan pengelolaan kekayaan negara, pemantauan pemberantasan korupsi serta pengelolaan data dan pengaduan	90%	90%	
	6 Terselenggaranya kegiatan VVIP, dukungan administrasi personel TNI dan Polri, dan penganugerahan tanda jasa dan tanda kehormatan	1 Persentase kegiatan VVIP yang terlaksana dengan tertib dan aman 2 Persentase pemberian dukungan administrasi personel TNI dan POLRI secara efektif 3 Persentase WNI dan WNA yang akan dianugerahi gelar tanda jasa dan tanda kehormatan sesuai kriteria	100% 90% 100%	100% 90% 100%	
	7 Saran kebijakan hasil pemantauan, evaluasi dan analisis atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang ditindaklanjuti	1 Kecepatan penyelesaian laporan hasil pemantauan, evaluasi dan analisis atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang politik dan keamanan, perekonomian, dan kesejahteraan rakyat 2 Persentase penyelesaian laporan hasil pemantauan, evaluasi dan analisis atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang politik dan keamanan, perekonomian, dan kesejahteraan rakyat	10 hari 70%	10 hari 90%	
	8 Saran kebijakan hasil pemantauan, evaluasi dan analisis atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang hukum yang ditindaklanjuti	1 Kecepatan penyelesaian penyiapan saran kebijakan hasil pemantauan, evaluasi dan analisis atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan	11 hari	11 hari	
	9 Penyelesaian permasalahan hukum yang ditindaklanjuti	2 Ketepatan penyelesaian penyiapan saran kebijakan hasil pemantauan, evaluasi dan analisis atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan	85%	90%	

KEMENTERIAN/LEMBAGA: SEKRETARIAT NEGARA

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp. Miliar)
			2010	2014	
	10 Rancangan Perpres, Keppres, dan Inpres yang ditindaklanjuti	3 Kecepatan penyelesaian permasalahan hukum	11 hari	11 hari	
	11 Saran kebijakan hasil pemantauan, evaluasi dan analisis atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang ditindaklanjuti	4 Ketepatan penyelesaian permasalahan hukum	85%	90%	
		5 Kecepatan penyelesaian penyiapan rancangan Peraturan Presiden, Keputusan Presiden, dan Instruksi Presiden	11 hari	11 hari	
		6 Ketepatan penyelesaian penyiapan rancangan Peraturan Presiden, Keputusan Presiden, dan Instruksi Presiden	85%	90%	
		1 Kecepatan penyelesaian laporan hasil pemantauan, evaluasi dan analisis atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang politik dan keamanan, perekonomian, dan kesejahteraan rakyat	10 hari	10 hari	
		2 Persentase penyelesaian laporan hasil pemantauan, evaluasi dan analisis atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang politik dan keamanan, perekonomian, dan kesejahteraan rakyat	70%	90%	
TOTAL ALOKASI SETNEG 2010-2014					11.084,1

**RENCANA TINDAK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH 2010-2014
PER KEMENTERIAN/LEMBAGA**

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN DALAM NEGERI

No	PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
1.	PROGRAM BINA PEMBANGUNAN DAERAH					1.300,0
a.	Fasilitasi Penataan Ruang Daerah dan Lingkungan Hidup di Daerah	Tersusunnya PP Sesuai Amanat UU 26/2007	Jumlah PP tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat. Jumlah Penyusunan NSPM Penataan Ruang Daerah.	1 PP 3 Permendagri	1 PP ^{K)} 13 Permendagri ^{K)}	40,8
		Tersusunnya Perda Sesuai Amanat UU 26/2007 dan Undang-Undang 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah :	Meningkatnya (Persentase) Penyelesaian Perda Sesuai Amanat UU 26/2007 dan Undang-Undang 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.	30% daerah	100% daerah	
		Bantuan Penyusunan Rencana Tata Ruang Daerah Pemekaran.	Jumlah RTR Daerah Pemekaran yang sudah disempurnakan.	2 daerah	14 ^{K)}	
		Meningkatnya keterpaduan dalam penataan ruang	Jumlah BKPRD yang terbentuk. Terselenggaranya Rakernas BKPRN. Terselenggaranya Raker BKPRD.	30% daerah - 2 kegiatan	90% daerah 2 kegiatan ^{K)} 6 kegiatan ^{K)}	
		Meningkatnya Pemahaman Aparat Daerah dalam Penataan Ruang.	Terselenggaranya Peningkatan SDM dalam Penataan Ruang (Pemda, BKPRD dan DPRD). Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Penataan Ruang.	1 kegiatan 1 kegiatan	5 kegiatan ^{K)} 5 kegiatan ^{K)}	
		Monitoring dan Evaluasi kinerja penyelenggaraan penataan ruang di Daerah.	Jumlah kegiatan evaluasi kinerja penyelenggaraan penataan ruang.	1 kegiatan	5 kegiatan ^{K)}	

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN DALAM NEGERI

No	PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)	
				2010	2014		
b.	Fasilitasi pembangunan kawasan perkotaan	Tersusunnya UU ttg Perkotaan	Jumlah naskah akademis		1	κ)	100,5
			Jumlah rancangan UU ttg Perkotaan		1	κ)	
			Jumlah uji publik RUU Perkotaan		1	κ)	
			Jumlah UU		1	κ)	
		Terbentuknya forum koordinasi pembangunan perkotaan di tingkat provinsi	Jumlah pedoman		1	κ)	
			Jumlah forum koordinasi pembangunan perkotaan tingkat provinsi di 5 wilayah pulau besar		15	κ)	
		Tersedianya Peraturan Daerah tentang penyediaan perumahan untuk MBR.	Jumlah Peraturan Daerah berkaitan dgn penyediaan perumahan bagi MBR di kawasan perkotaan.		40	κ)	
		Tersusunnya pedoman peningkatan peran PKL dan peremajaan kawasan kumuh perkotaan dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan di perkotaan.	Jumlah kebijakan/pedoman	1 rancangan pedoman	1	κ)	
			Jumlah personil Pemda dan masy yang mengikuti training .		400	κ)	
		Tersusunnya kebijakan Kemendagri terkait dgn pengendalian masalah sosial dan penyakit menular di kawasan perkotaan.	Jumlah kebijakan/pedoman	1 ranc. pedoman	1	κ)	
			Jumlah prov, kab/kota yang mendapat fasilitasi Pemda dalam mengoptimalkan pengendalian masalah sosial dan penyakit menular.		28 provinsi dan 120 kab/kota	κ)	
		Tersusunnya pedoman dalam rangka penguatan peran lembaga masyarakat perkotaan dalam peran sertanya bagi percepatan pemb.perkotaan.	Jumlah pedoman.	1 rancangan pedoman	1	κ)	
			Jumlah kelembagaan masyarakat (LKM) yang difasilitasi		200	κ)	
		Tersusunnya pedoman pengelolaan dan pelestarian bangunan warisan budaya di perkotaan	Jumlah naskah akademis	1	1	κ)	
Jumlah pedoman			1	κ)			

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN DALAM NEGERI

No	PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
		Terfasilitasinya pemda dalam penyusunan kebijakan daerah tentang pengelolaan dan pelestarian bangunan warisan budaya	Jumlah kota yang memiliki perda tentang pengelolaan dan pelestarian bangunan warisan budaya		25	K)
		Terbangunnya sistem informasi dan data base perkotaan yang terintegrasi mulai dari kab/kota, provinsi dan pusat.	Jumlah data tipologi kawasan perkotaan seluruh Indonesia.	1	1	K)
			Jumlah aplikasi data base sistem informasi kawasan perkotaan	1	1	K)
			Jumlah kab/kota, provinsi yang memiliki data base dan terintegrasi dalam satu sistem informasi kawasan perkotaan		140	K)
		Terbentuknya lembaga dan badan pengelola kawasan perkotaan	Tersusunnya pedoman pembentukan lembaga/badan pengelola kawasan perkotaan	1 ranc. pedoman	1	K)
			Jumlah kota yang difasilitasi dalam untuk penyiapan pola pengelolaan kawasan perkotaan		15	K)
		Terumuskannya kebijakan Kemendagri terkait dengan percepatan pembangunan sanitasi perkotaan	Jumlah kab/kota yang terfasilitasi dalam pembentukan Pokja.	49	365	K)
			Jumlah kebijakan/pedoman		1	K)
		Terlaksananya kerjasama city sharing	Jumlah Best Practices Perkotaan Unggulan	4	20	K)
			Jumlah Kerjasama City Sharing	10	50	K)
		Terlaksananya kerjasama sister city	Jumlah kerjasama sister city	4	20	K)
			Jumlah Kerjasama Sister City yang berjalan (terlaksana)	10	50	K)
		Terlaksananya Kerjasama Pembangunan Perkotaan Kawasan Metropolitan	Jumlah Badan Kerjasama Kawasan Metropolitan yang terbentuk.	1	9	K)
			Jumlah Rencana Objek Kerjasama yang tersusun set memadai	2	22	K)

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN DALAM NEGERI

No	PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)	
				2010	2014		
		Tertatanya batas, fungsi, nama dan luas kawasan perkotaan non otonom	Jumlah pedoman pembentukan, batas, fungsi dan luas kawasan perkotaan	1	1 ^{k)}		
			Jumlah supervisi dan fasilitasi pembentukan, batas, fungsi dan luas kawasan perkotaan		80 ^{k)}		
		Terlaksananya fasilitasi pemda dalam penyusunan perda pengelolaan lingkungan dan mitigasi bencana	Jumlah kota terfasilitasi.		45 ^{k)}		
		Tersusun dan terlaksananya kebijakan tentang pengelolaan pasar tradisional	Jumlah kebijakan		1 ^{k)}		
			Jumlah kota yang memiliki kebijakan tentang pengelolaan pasar tradisional			15 ^{k)}	
			Jumlah evaluasi kota yang telah menerapkan modernisasi pengelolaan pasar tradisional			10 ^{k)}	
		Tersusunnya Pedoman Standar Pelayanan Perkotaan (kebijakan mengenai jenis-jenis pelayanan yang harus tersedia dalam suatu kawasan perkotaan)	Jumlah kebijakan/pedoman	1	1 ^{k)}		
			Jumlah prov, kab/kota yang difasilitasi dan penyiapan kebutuhan perencanaan pembangunan perkotaan sesuai SPP			10 kab/kota di 3 provinsi	
		Terlaksananya penilaian terhadap daerah yang mengikuti IMP Award	Jumlah penghargaan IMP	15	45 ^{k)}		
			Jumlah dokumen evaluasi dan penyempurnaan sistem penilaian IMP Award			2 ^{k)}	
		Terfasilitasi dan tersupervisinya penyelenggaraan penyerahan aset PSU dari pengembang ke Pemda	Jumlah Prov, kab/kota yang terfasilitasi dan tersupervisi dalam penyelenggaraan penyerahan aset PSU dari pengembang ke Pemda	5 prov, 10 kab/kota	25 prov, 50 kab/kota ^{k)}		
			Jumlah prov, kab/kota yang terfasilitasi dalam penyusunan Perda terkait PSU di daerah			10 kab/kota dari 3 provinsi	
		Tersusunnya standar pengukuran besaran RTH kawasan perkotaan dan perda terkait RTH di kawasan perkotaan.	Jumlah kebijakan/dokumen	1 konsep rancangan dokumen.	1 ^{k)}		
			Jumlah Kabupaten/kota yang terfasilitasi			28 ^{k)}	

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN DALAM NEGERI

No	PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
		Terlaksananya fasilitasi pemda dalam penyusunan perda berkaitan dengan pemberian IMB	Jumlah daerah terfasilitasi.		31 ^{k)}	
			Jumlah daerah yang memiliki perda ttg Pemberian IMB		31 ^{k)}	
		Meningkatnya kinerja pemerintah daerah dalam perencanaan perkotaan dan melaksanakan tertib ruang	Jumlah daerah yg terfasilitasi dalam penyelenggaraan perencanaan di kawasan perkotaan	10	50 ^{k)}	
			Jumlah pedoman koordinasi pengawasan dan pengendalian pembangunan perkotaan		1 ^{k)}	
			Jumlah kegiatan koordinasi pengawasan dan pengendalian provinsi (5 wilayah)		15 ^{k)}	
			Jumlah hasil evaluasi kinerja pemda dalam pengawasan dan pengendalian pembangunan perkotaan		3 ^{k)}	
c.	Peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah	Tersusunnya regulasi/ kebijakan pengembangan ekonomi lokal dan daerah terkait dengan Optimalisasi Potensi, Promosi, Sarana dan Prasarana, Kerjasama serta Kelembagaan Ekonomi Daerah	Jumlah regulasi/kebijakan yang disusun dan disahkan, terkait dengan optimalisasi potensi, promosi, sarana dan prasarana, kerjasama serta kelembagaan ekonomi daerah.	1 pkt	5 pkt ^{k)}	221,2
	Berkembangnya lembaga usaha ekonomi daerah terutama di bidang permodalan dan perijinan usaha	Jumlah SOP/Institusi/Unit Pelayanan Terpadu (UPT) untuk pelaksanaan OSS (One Stop Services), termasuk di kawasan transmigrasi, agropolitan/minapolitan, kawasan sentra produksi, klaster industri, dan kawasan khusus lainnya.	1 paket	5 paket ^{k)}		
	Mempercepat proses perijinan di daerah	jumlah daerah yang membentuk PTSP	5%	70%		
		PTSP yang siap menerapkan SPIPISE	5%	60%		
		Pembatalan Perda bermasalah	100%	100%		
		Daerah yang mengurangi biaya untuk berusaha	30%	70%		

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN DALAM NEGERI

No	PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
		Tersedianya data dan informasi tentang terkait dengan potensi, sarana dan prasarana, kerjasama dan kelembagaan ekonomi daerah	Tersedianya data dan info terkait dengan Potensi, Promosi, Sarana, Kerjasama dan Kelembagaan Ekonomi Daerah.	1 pkt	5pkt ^{K)}	
			Terlaksananya desiminasi/sosialisasi hasil pengembangan data dan info terkait dengan potensi, promosi, sarana dan prasarana, kerjasama serta kelembagaan ekonomi daerah	1 pkt	5 pkt ^{K)}	
		Terfasilitasinya Daerah dalam memecahkan permasalahan implementasi kebijakan yang terkait dengan Potensi, Promosi, Sarana dan Prasarana, Kerjasama serta Kelembagaan Ekonomi Daerah	Jumlah daerah yang terfasilitasi dalam upaya memecahkan permasalahan implementasi kebijakan yang terkait dengan Potensi, Promosi, Sarana dan Prasarana, Kerjasama serta Kelembagaan Ekonomi Daerah	15 prov/kab/ kota	25 prov/kab/kota	
		Terlaksananya peningkatan wawasan aparatur dlm bidang pengembangan ekonomi lokal dan daerah.	Jumlah workshop Diseminasi/ studi Banding mengenai pengembangan ekonomi lokal dan daerah.	1 pkt	5 pkt ^{K)}	
		Terbentuknya forum lintas stakeholder terkait perencanaan dan penganggaran program/kegiatan pengembangan ekonomi lokal dan daerah	Jumlah forum lintas stakeholder yang aktif	1 pkt	5 pkt ^{K)}	
		Meningkatnya ketersediaan tenaga fasilitasi dan jangka waktu fasilitasi kepada pelaku usaha ekonomi daerah mengenai kualitas produksi, pengolahan dan pemasaran	§ Jumlah tenaga fasilitator, baik di pusat maupun daerah, termasuk di kawasan transmigrasi, agropolitan/minapolitan, kawasan sentra produksi, klaster industri, dan kawasan strategis lainnya	1 pkt	5 pkt ^{K)}	
			§ Jumlah lembaga fasilitasi di daerah	1 unit	5 unit ^{K)}	
			§ Jangka waktu penyelenggaraan fasilitasi di daerah, termasuk di kawasan transmigrasi, agropolitan/minapolitan, kawasan sentra produksi, klaster industri dan kawasan strategi lainnya.	10 bln	10 bln	

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN DALAM NEGERI

No	PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
		Meningkatnya kualitas kerja sama antar daerah dan kemitraan pemerintah swasta dalam mendukung pengembangan ekonomi lokal dan daerah	Jumlah forum kerjasama antar daerah/wilayah	-	1 pkt evaluasi hasil kinerja forum kerjasama/kemitraan	
			Jumlah sektor / bidang ekonomi yang dikerjasamakan	-	1 pkt evaluasi hasil kerjasama kemitraan dibid eklok antar daerah/ swasta	
			Jumlah MoU PPP	-	1 pkt evaluasi potensi eklok yang dapat di kerjasamakan.	
			-	Optimalisasi pelaksanaan kerjasama dlm rangka mendorong pengembangan eklok dan daerah (Care, Plan, CHF dan AusAID)	Evaluasi hasil kerjasama pengembangan eklok dan daerah (Care, Plan, CHF dan AusAID)	
		Meningkatnya kualitas kerja sama antar daerah dan kemitraan pemerintah swasta dalam mendukung pengembangan ekonomi lokal dan daerah	Jumlah forum kerjasama antar daerah/wilayah	-	1 pkt evaluasi hasil kinerja forum kerjasama/kemitraan	

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN DALAM NEGERI

No	PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
				Finalisasi pedum pengembangan model kerjasama ekonomi daerah	Evaluasi pelaksanaan pedum pengembangan model kerjasama ekonomi daerah	
				Penyusunan instrumen kerjasama ekonomi daerah	Evaluasi pelaksanaan instrumen kerjasama ekonomi daerah	
d.	Fasilitasi Pengembangan Wilayah Terpadu	Terlaksananya koordinasi pengelolaan dan pengembangan kawasan	Persentase daerah yang menerapkan pedoman/kebijakan terkait dengan pengembangan potensi perekonomian daerah	50%	100%	438,6
		Meningkatnya pertumbuhan dan pemerataan hasil pembangunan kawasan perbatasan dan pulau-pulau kecil	Jumlah pedoman/kebijakan terkait dengan pengembangan wilayah perbatasan dan pulau-pulau kecil	1	1	
			Persentase wilayah perbatasan dan pulau-pulau kecil, yang mengimplementasikan pedoman/kebijakan terkait dengan pengembangan wilayah perbatasan dan pulau-pulau kecil	20%	90%	
		Terwujudnya optimalisasi pengembangan wilayah tertinggal, perbatasan, pesisir, dan pulau kecil, dan kawasan strategis cepat tumbuh	% Pemerintah Daerah yang melaksanakan kebijakan terkait dengan PNPB PISEW di 9 Provinsi	20%	90%	
		Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Kawasan Perbatasan	Persentase terfasilitasinya wilayah perbatasan untuk mendorong pertumbuhan Ekonomi.	5%	100%	

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN DALAM NEGERI

No	PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
2.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA					50.547,8
a.	Peningkatan Kemandirian Masyarakat Perdesaan (PNPM-MP)	Pelayanan percepatan penanggulangan kemiskinan, pengangguran di kecamatan dan desa/ (PNPM-Perdesaan); PNPM-RISE (PISEW); DAN PNPM-LMP sesuai standar.	Cakupan penerapan PNPM-MP dan penguatan PNPM Cakupan wilayah kegiatan rekonstruksi dan rehabilitasi pasca bencana, khususnya di Kab. Nias dan Nias Selatan	4.791 kec 2 Kab./9 Kec.	32 provinsi 2.133 kec, (termasuk 95 2 Kab/9 Kec. ^{ks})	48.782,0
b.	Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan	<ul style="list-style-type: none"> · Mewujudkan pemerintahan desa yang demokratis dan efektif dalam rangka pemberian pelayanan kepada masyarakat. · Mengembangkan manajemen pemerintahan desa yang efektif, dengan tetap mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai perkembangan masyarakat. · Memperkuat kemampuan Perangkat Desa dan anggota Badan Perwakilan Desa, agar mampu menyelenggarakan pemerintahan desa secara demokratis dan efektif. · Meningkatkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam memfasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa. 	<ul style="list-style-type: none"> · Jumlah fasilitasi pelayanan administrasi pemerintahan desa dan kelurahan melalui Bintek konsolidasi , inventarisasi serta penyusunan UU tentang Desa. · Jumlah fasilitasi pengelolaan keuangan dan aset desa serta kelurahan melalui Bintek, inventarisasi dan pendataan keuangan dan aset desa, pengembangan desa wisata sebagai sumber PAD · Jumlah fasilitasi pengembangan desa dan kelurahan melalui penetapan indikator keberhasilan pemdes, penetapan dan penegasan, pemetaan batas wilayah desa, penyusunan data based desa dan kelurahan, bimtek, dan koordinasi. · Jumlah fasilitasi peningkatan kapasitas melalui TOT, Bimtek peningkatan kapasitas aparat desa dan kelurahan 	<ul style="list-style-type: none"> 33 Prov 86 Kab 1 Produk Hukum 15 Provinsi 30 Kabupaten 8 Provinsi, 10 Kabupaten, 20 Desa 600 Orang dari 32 Provinsi, 18 Kab/Kota 	<ul style="list-style-type: none"> 33 Prov 100 Kab 2 Produk Hukum ^{ks}) 32 Provinsi 192 Kab 32 Provinsi 64 Kabupaten 128 Desa 1000 Orang dari 32 Provinsi, 32 Kab/Kota 	134,5

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN DALAM NEGERI

No	PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
			· Jumlah fasilitasi pemantapan Badan Permusyawaratan Desa melalui BinteK, Orientasi, Koordinasi, Monitoring dan evaluasi	15 Provinsi 30 Kabupaten 60 BPD	32 Provinsi 192 Kab 384 BPD	
c.	Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Dan Desa Lingkup Regional					137,0
		· Meningkatkan kapasitas Aparat dan Masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa.	· Jumlah pelatihan di bidang pemberdayaan aparatur desa/kelurahan sesuai standar	27 Angkt	147 Angkt ^{K)}	
			· Jumlah pelatihan di bidang pemberdayaan lembaga masyarakat desa/kelurahan sesuai standar	30 Angkt	174 Angkt ^{K)}	
			· Biaya rata-rata pelayanan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, administrasi umum, perpustakaan, perlengkapan dan rumah tangga.	100%	1	
d.	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Dan Pelatihan Masyarakat					311,3
		■ Pelayanan pengembangan kelembagaan dan pelatihan masyarakat sesuai standar.	■ Jumlah pelatihan yang diberikan bagi masyarakat perdesaan melalui penyusunan kurikulum dan modul, pelatihan, sinkronisasi, TOT;	12 Angkt 480 orang dari 32 Prov	25 Angkt 1000 orang dari 32 Prov	
			■ Jumlah fasilitasi pendataan potensi desa melalui Pedataan dan Pendayagunaan Profil Desa/Kelurahan, Penyelenggaraan Lomba Desa/Kelurahan	33 prov, 394 Kab 5 Kelurahan dan 5 Desa	33 prov, 468 Kab 5 Kelurahan dan 5 Desa	
			■ Jumlah Program dan Kegiatan masuk desa dan peningkatan system perencanaan partisipatif melalui Sosialisasi, Bimtek, Pelatihan dan Monitoring dan evaluasi.	12 Kegiatan di 32 Provinsi, 12 Kabupaten	32 Kegiatan di 32 Provinsi, 32 Kabupaten	

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN DALAM NEGERI

No	PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)	
				2010	2014		
			■ Jumlah penataan ruangan kawasan pedesaan melalui fasilitasi Pemda dalam penyusunan perda tentang tata ruang kawasan pedesaan, pengembangan Pusat pertumbuhan antar desa (PPTAD), bimtek, dan koordinasi.	10 Kab. di 10 Provinsi	50 Kab di 25 Provinsi		
			■ Menata kembali peranan dan fungsi lembaga masyarakat, khususnya Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa Atau Sebutan Lain.	■ Jumlah Fasilitasi penataan dan pengembangan lembaga kemasyarakatan di desa melalui Bimtek, pelatihan, pendataan	33 prov		33 prov
					468 kab		468 kab
					12 lkeg		48 lkeg
Peningkatan kapasitas kelembagaan dan pelatihan masyarakat	Meningkatnya kapasitas kelembagaan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan	Jumlah daerah tertinggal yang memperoleh fasilitasi peningkatan kelembagaan dan pelatihan masyarakat (provinsi)	32 prov				
c.	Fasilitasi Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya Masyarakat	Pelayanan pengembangan pemberdayaan adat dan sosial budaya masyarakat sesuai standar.	Jumlah fasilitasi kesejahteraan sosial melalui Sosialisasi, Bimtek dan Identifikasi pendataan serta penguatan kelembagaan di daerah. Jumlah fasilitasi pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (PKK) melalui Penguatan Keleb. Posyandu, Pendataan Posyandu, peningkt. Peran posyandu dlm kesehatan keluarga, pelaks. Bangdesmadu.	33 Prov.	33 Prov.	216,5	
				15 Kab	36 Kab		
				6 Keg.	10 Keg.		
				33 prov	33 prov		
				468 kab	468 kab		

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN DALAM NEGERI

No	PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
			<ul style="list-style-type: none"> Jumlah fasilitasi tenaga kerja pedesaan yang memperoleh pembinaan dan perlindungan keselamatan kerja pedesaan melalui peningkatan kemampuan tenaga kerja pedesaan di wilayah perbatasan antar Negara, penyusunan permendagri, pelatihan dan orientasi. Jumlah pelaksanaan pembinaan budaya nusantara melalui inventarisasi KAT, pelestarian Adat dan Budaya Nusantara dengan pemberian stimulant kepada pemerhati adat dan budaya Jumlah dan fasilitasi pelaksanaan peningkatan pemberdayaan perempuan melalui pendataan, bintek, dan pemberantasan buta aksara; 	<ul style="list-style-type: none"> 33 Prov 50 Kab 7 Keg. 15 Kab 13 Keg 10 Kab. di 10 Provinsi 	<ul style="list-style-type: none"> 33 Prov 50 Kab 10 Keg. 50Kab 7 Keg 50 Kab di 25 Provinsi 	
f.	Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat					287,8
		<ul style="list-style-type: none"> Terwujudnya usaha masyarakat di pedesaan yang maju, mandiri dan berorientasi pada pemenuhan permintaan pasar, dalam rangka meningkatkan ketahanan ekonomi nasional Terwujudnya usaha ekonomi masyarakat di pedesaan yang maju, mandiri dan berorientasi pada pemenuhan permintaan pasar, dalam rangka meningkatkan ketahanan ekonomi nasional. 	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah Fasilitasi Pemda dalam pengembangan usaha ekonomi masyarakat tertinggal termasuk PNPM-PISEW Jumlah fasilitasi pelaksanaan peningkatan usaha ekonomi keluarga melalui TOT dan pelatihan kewirausahaan, pemberian stimulan kepada kelompok masyarakat pesisir dan penguatan kelembagaan BUMKEL. 	<ul style="list-style-type: none"> 33 Prov. 32 Kab 15 Kab 13 Keg 	<ul style="list-style-type: none"> 33 Prov. 32 Kab 50Kab 7 Keg 	

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN DALAM NEGERI

No	PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
			· Jumlah fasilitasi usaha ekonomi masyarakat tertinggal melalui pelatihan, pemetaan/identifikasi, koordinasi, sosialisasi, penyusunan proksi kemiskinan serta pemberian stimulan kepada kelompok masyarakat tertinggal; (termasuk PNPB-PISEW) .	33 Prov.	33 Prov.	
				15 Kab	36 Kab	
			· Jumlah fasilitasi pelaksanaan usaha perkreditan dan simpan pinjam dan lembaga keuangan mikro pedesaan melalui Bintek, koordinasi, dan pemberian stimulan kepada kelompok masyarakat,	33 Prov	33 Prov	
				6 Keg.	8 Keg.	
			· Persentase Lembaga Keuangan Mikro Pedesaan/UED-SP yang berfungsi	20%	0,7	
			· Jumlah fasilitasi pengembangan dan pengelolaan pasar desa/ pasar lokal dan pengembangan informasi pasar melalui Bintek Pengelolaan Pasar Desa bagi aparat pemerintah Desa, Pengelola Pasar dan BPD, memberikan Stimulan kepada Pasar Desa;	33 Prop	33 Prop	
				10 Kab, 20 Desa	10 Kab, 60 Desa	
		· Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana pedesaan terutama sarana prasarana pemasaran hasil produksi masyarakat desa	· Jumlah ketersediaan sarana dan prasarana pemasaran hasil produksi masyarakat desa	20 pasar	235 pasar ^{K)}	
		· Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana pedesaan terutama sarana prasarana pemasaran hasil produksi masyarakat desa	· Tingkat pelayanan dan akses masyarakat terhadap sarpras pedesaan	-	80 Kab	

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN DALAM NEGERI

No	PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
		<ul style="list-style-type: none"> - Tersusunnya RTR desa oleh Kab/Kota - Pelayanan pengembangan usaha ekonomi masyarakat sesuai standar. 	<ul style="list-style-type: none"> - Tersusunnya RTR desa oleh kab/kota - Jumlah fasilitasi usaha di bidang pertanian dan pangan yang berada di perdesaan melalui Bintek CPPD Provinsi dan Kabupaten/Kota, koordinasi, serta pemberian stimulan kepada kelompok masyarakat pengelola Cadangan Pangan Pemerintah Desa (CPPD). 	<ul style="list-style-type: none"> - 33 Prov. 15 Kab 6 Keg 	<ul style="list-style-type: none"> 120 Kab. 33 Prov. 36 Kab 10 Keg 	
g.	Fasilitasi Pengelolaan Sumber Daya Alam Dan Teknologi Tepat Guna	<ul style="list-style-type: none"> - Pelayanan pengelolaan sumber daya alam dan pendayagunaan teknologi tepat guna sesuai standar. 	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah fasilitasi pelaksanaan pengelolaan konservasi dan rehabilitasi lingkungan perdesaan melalui pelatihan, rakor, supervisi, BLM dan evaluasi dengan kegiatan: (a) pemanfaatan lahan kritis sebagai pilot project DME (b) Pengelolaan Desa Hutan (c) Pengelolaan Hutan Mangrove - Jumlah fasilitasi pembangunan sarana dan prasarana perdesaan melalui orientasi, pelatihan, koordinasi, bintek AMPL (PAMSIMAS). 	<ul style="list-style-type: none"> 14 desa di 13 provinsi 4 desa, 4 provinsi 1 desa 1 provinsi 33 Prov. 32 Kab 	<ul style="list-style-type: none"> 20 desa di 20 provinsi 5 desa, 5 provinsi 2 desa, 2 provinsi 33 Prov. 10 Keg. 	165,8

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN DALAM NEGERI

No	PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
			· Jumlah hasil kajian dan pemetaan kebutuhan teknologi perdesaan yang diterapkan termasuk di wilayah perbatasan.	32 provinsi 50 kab. tertinggal	32 provinsi 50 kab. tertinggal	
			· Jumlah fasilitasi pemyarakatan dan kerjasama teknologi tepat guna melalui Pelatihan, Bintek Posyantekdes, BLM, Gelar TTG, Koordinasi, dan Monev	· 33 Provinsi · 35 Kab/Kota · 4 Pokmas · 20 Posyantekdes · 8 Usaha Mikro dan Kecil (UMK)	· 33 Provinsi · 35 Kab/Kota 20 Pokmas ^{K)} 100 Posyantekdes ^{K)} 40 UMK ^{K)}	
3.	PROGRAM PENGELOLAAN DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH					731,2
a.	Penataan Urusan Pemerintahan Daerah dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Terselenggaranya penguatan dan pemantapan urusan pemerintahan daerah pada aspek pelaksanaan dan pengembangan urusan pemerintahan daerah, serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan.	Jumlah Kebijakan penyempurnaan pembagian urusan pemerintahan antar tingkat pemerintahan dalam revisi UU No. 32 Tahun 2004. Jumlah Peraturan Pemerintah tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, sebagai turunan dari revisi UU No. 32 Tahun 2004. Jumlah Sosialisasi penyempurnaan pembagian urusan pemerintahan antar tingkat pemerintahan kepada K/L dan Pemerintah Daerah.	1 Kebijakan	1 Kebijakan ^{K)} 1 Peraturan Pemerintah ^{K)} 1 Paket ^{K)}	62,9

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN DALAM NEGERI

No	PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
			Persentase pelaksanaan urusan yang telah menjadi kewenangan pemerintahan daerah	-	100%	
			Persentase daerah yang sudah menyelesaikan perda mengenai kewenangan/urusan (wajib dan pilihan) pada pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota.	30%	100%	
			Persentase Perda kewenangan/urusan pada pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota yang telah	30%	100%	
			Jumlah bidang urusan yang telah disusun Norma Standar Prosedur Kriteria (NSPK) oleh K/L dan fasilitasi implementasi	5 bidang urusan	31 bidang urusan	
		Terwujudnya harmonisasi peraturan perundang-undangan terkait dengan peraturan perundang-undangan desentralisasi dan otonomi daerah, baik di Pusat maupun antara Pusat dan Daerah dalam rangka reformasi regulasi secara bertahap.	Persentase peraturan perundang-undangan sektoral yang diinventarisasi yang belum sejalan dengan peraturan perundang-undangan desentralisasi dan otonomi daerah di pusat dan di daerah	100%	100%	
			Persentase harmonisasi peraturan perundang-undangan sektoral dengan peraturan perundang-undangan desentralisasi dan otonomi daerah di pusat	20%	60%	
b	Pengembangan Kapasitas dan Evaluasi Kinerja Daerah	Terevaluasinya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	Persentase daerah yang dievaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan	100%	100%	60,5
		Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai tindaklanjut dari pengawasan dan evaluasi kinerja pemerintahan daerah	Persentase daerah yang meningkat kinerja pemerintahan daerahnya dalam penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah	60%	90%	
c	Penetapan Indikator Kinerja Utama Pelayanan Publik yang selaras antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah	Tersusunnya SPM Bidang lainnya yang belum diterbitkan sampai dengan akhir tahun 2009	Jumlah SPM yang ditetapkan	13 SPM	17 SPM	7,5

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN DALAM NEGERI

No	PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
d	Penerapan Indikator Utama Pelayanan Publik di Daerah	Meningkatnya Implementasi Urusan Pemerintahan Daerah dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Daerah.	Jumlah Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah diterapkan oleh Daerah	5 SPM	17 SPM	20,0
			Jumlah bidang SPM yang dimonitor penerapannya	-	17 bidang SPM ^{κ)}	
			Jumlah bidang SPM yang dievaluasi penerapannya	-	17 bidang SPM ^{κ)}	
e.	Penataan Daerah Otonom dan Otonomi Khusus	Terbitnya UU Keistimewaan DIY	Jumlah undang-undang	1 UU	1 UU ^{κ)}	25,0
		Tersusunnya dan terimplementasinya peraturan pelaksana seluruh UU yang mengatur otonomi khusus	Jumlah peraturan pelaksana turunan UU yang mengatur daerah dengan otonomi khusus	3 RPP dan 2 Perpres	3 RPP dan 2 Perpres ^{κ)}	
		Terevaluasinya perkembangan Daerah Otonom Baru	Persentase daerah otonom baru (< 3 th) yang dievaluasi	100%	100%	
f.	Penghentian/pembatasan pemekaran wilayah	Terlaksananya seluruh mekanisme pengusulan pemekaran dan penggabungan daerah sesuai dengan PP No 78 tahun 2007, dalam rangka penghentian/pembatasan pemekaran wilayah/pembentukan daerah otonom baru.	Jumlah Strategi Dasar Penataan Daerah	1 paket	1 paket ^{κ)}	20,0
			Persentase evaluasi setiap usulan pemekaran, penggabungan, dan penghapusan daerah sesuai dengan PP No 78 tahun 2007	-	100%	
			Jumlah daerah otonom baru yang terbentuk berdasarkan usulan Pemerintah	-	0 (nol)	
g.	Pembinaan administrasi pejabat negara di daerah dan DPRD	Kapasitas kepala daerah dan pimpinan DPRD yang memadai dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	Jumlah kepala daerah dan pimpinan DPRD yang mengikuti kegiatan orientasi bagi peningkatan kemampuan dalam menjalankan fungsi-fungsi kepemimpinan daerah, legislasi, penganggaran, dan pengawasan, serta inovasi pemerintahan dan pembangunan.	Kepala daerah 5 kabupaten/kota terpilih di setiap provinsi pada 33 provinsi.	Kepala daerah di ^{κ)} 478 kabupaten/kota otonom.	18,7
				Pimpinan DPRD 5 kabupaten/kota terpilih di setiap provinsi pada 33 provinsi.	Pimpinan DPRD di ^{κ)} 491 kabupaten/kota otonom	

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN DALAM NEGERI

No	PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
				Kepala daerah provinsi pada 33 provinsi.	Kepala daerah provinsi pada 33 provinsi. ^{KS)}	
				Pimpinan DPRD provinsi pada 33 provinsi.	Kepala daerah dan pimpinan DPRD provinsi pada 33 provinsi. ^{KS)}	
			Jumlah laporan evaluasi terhadap peningkatan kapasitas kepala daerah dan DPRD		1 paket ^{KS)}	
		Meningkatnya kualitas Perda yang berasal dari usul inisiatif DPRD	Jumlah perwakilan dari masing-masing komisi DPRD yang mengikuti diklat <i>Regulatory Impact Assesment</i> (RIA) atau harmonisasi peraturan perundangan.	Perwakilan dari masing-masing komisi DPRD di 5 kabupaten/kota terpilih di setiap provinsi pada 33 provinsi.	Perwakilan dari masing-masing komisi DPRD di 491 Kab/Kota ^{KS)}	
			Jumlah laporan evaluasi kualitas Perda yang berasal dari usul inisiatif DPRD		1 paket ^{KS)}	
h	Penyempurnaan pelaksanaan pemilihan kepala daerah	Tersusunnya UU tentang PEMILU Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan terselenggaranya Pilkada yang efisien.	Persentase revisi terbatas UU No. 32 tahun 2004 terkait dengan efisiensi pelaksanaan Pilkada	100%	100%	3,0
			Jumlah UU tentang PEMILU Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1 UU	1 UU ^{KS)}	
i	Penyusunan Peraturan Perundangan Pemerintahan Daerah	Terselenggaranya dukungan pelayanan teknis dan administrasi berkualitas di lingkungan Direktorat Jenderal Otonomi Daerah	Jumlah penetapan UU tentang pemerintahan daerah sebagai revisi UU No. 32 Tahun 2004	1 UU	1 UU ^{KS)}	9,5
			Persentase penyelesaian penyusunan peraturan pelaksanaan UU hasil revisi UU No. 32 Tahun 2004		100%	
			Jumlah sosialisasi peraturan bidang otonomi daerah	1 paket	5 paket ^{KS)}	

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN DALAM NEGERI

No	PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
4.	PROGRAM PENGUATAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM					1.655,0
a.	Pengembangan Kawasan dan Otorita	Meningkatnya pengembangan kawasan dan otorita di daerah	Persentase fasilitasi kawasan otorita, kawasan industri dan perdagangan bebas, dan kawasan kepentingan umum yang dikelola dan dikembangkan	65%	90%	105,8
b.	Pengembangan Manajemen Pencegahan dan Penanggulangan Bencana	Meningkatnya sarpras Pemerintahan Pasca Bencana/pengurangan resiko bencana	Persentase sarpras yang diberikan kepada daerah	40%	75%	211,7
		Meningkatnya kapasitas aparat dalam upaya penanggulangan bencana daerah dan bahaya kebakaran	Persentase fasilitasi peningkatan kapasitas aparat dalam upaya penanggulangan bencana dan bahaya kebakaran	75%	75%	
c.	Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerjasama Daerah	Meningkatnya daerah yang menerima manfaat dari kerjasama daerah dalam bidang ekonomi, prasarana dan pelayanan publik	Persentase peningkatan jumlah daerah yang melaksanakan kerjasama daerah dalam bidang ekonomi, prasarana dan pelayanan publik.	10%	20% dari jumlah di tahun 2013	141,4
			Persentase jumlah daerah yang menerima manfaat dari kerjasama daerah dalam bidang ekonomi, prasarana dan pelayanan publik.	50%	75%	
			Jumlah sistem database dan sistem movev kerja sama daerah yang disusun		1 paket ^{k)}	
			Jumlah pemetaan pelaksanaan Kerjasama Daerah baik yang sukses maupun yang gagal		1 paket ^{k)}	
			Jumlah pemutakhiran pemetaan pelaksanaan kerja sama daerah baik yang sukses maupun yang gagal		2 paket ^{k)}	

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN DALAM NEGERI

No	PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
		Meningkatnya kerjasama antar daerah	Persentase jumlah kegiatan fasilitas kerjasama antar daerah yang diusulkan	75%	75%	
		Tersusunnya regulasi Pusat tentang administrasi pelayanan terpadu di tingkat kecamatan	Jumlah Permendagri tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan.	1 Permendagri	1 Permendagri ^{K)}	
		Terlaksananya administrasi pelayanan terpadu di tingkat kecamatan.	Persentase kabupaten/kota yang telah melaksanakan pelayanan administrasi terpadu kecamatan	10% kabupaten/kota telah memiliki dan menerapkan regulasi pelayanan terpadu di tingkat kecamatan	50% kabupaten/kota telah memiliki dan menerapkan regulasi pelayanan terpadu di tingkat kecamatan	
d.	Pengembangan dan Penataan Wilayah Administrasi dan Perbatasan	Terfasilitasinya pengembangan dan penataan wilayah administrasi, penegasan batas daerah, perbatasan antar negara, toponimi, dan pertanahan	Persentase jumlah rumusan kebijakan dan produk hukum penataan wilayah administrasi dan penegasan batas daerah, pengembangan wilayah perbatasan, toponimi, dan pertanahan.	75%	95%	977,2
			Jumlah segmen penataan dan penegasan batas wilayah administrasi perbatasan antar daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Perundangan	15 segmen	15 segmen	
			Persentase pemetaan rupabumi (toponimi)	15%	100%	
		Meningkatnya kemampuan pengelolaan Pos Lintas Batas (PLB) internasional dan tradisional secara terpadu yang telah disepakati antar negara	Jumlah Pos lintas Batas tradisional dan internasional dengan kualitas manajemen pengelolaan serta fasilitas pendukung yang memadai	3	3	

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN DALAM NEGERI

No	PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
		Terfasilitasinya penguatan kelembagaan wilayah perbatasan antar negara	Prosentase penguatan kelembagaan di pusat dan daerah dalam rangka penanganan perbatasan antar negara.	25%	100%	
		Meningkatnya sarpras perbatasan antar negara dan pulau-pulau terluar dalam rangka pelayanan umum pemerintahan	Prosentase jumlah kab/kota di wilayah perbatasan antar negara dan pulau-pulau terluar yang mendapat sarpras perbatasan antar negara	25%	100%	
		Meningkatnya kerjasama perbatasan antar negara (SOSEKMALINDO, JBC RI-RDTL, JBC RI-PNG)	Jumlah provinsi yang termasuk ke dalam perbatasan antar negara (SOSEKMALINDO, JBC RI-RDTL, JBC RI-PNG)	6	6	
5.	PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN DALAM NEGERI					949,0
a.	Penataan Produk Hukum dan Pelayanan Bantuan Hukum Departemen	Percepatan harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan di tingkat Pusat dan daerah hingga tercapai keselarasan arah dalam implementasi pembangunan.	Jumlah perda yang dikaji	3.000 perda	20.000 perda ^{ki)}	12,5
b.	Penataan Kelembagaan, Ketatalaksanaan, Analisis Jabatan, dan Pelaporan Kinerja	Tersusunnya peraturan pemerintah pengganti PP No 41 tahun 2007 dan peraturan-peraturan pelaksanaannya agar organisasi perangkat daerah dapat efektif dan efisien dalam melaksanakan seluruh SPM yang telah ditetapkan serta mengharmoniskan dengan amanat perundang-undangan sektor dalam pembentukan organisasi sektor di daerah.	Jumlah evaluasi pelaksanaan PP No. 41 Tahun 2007	1 paket	1 paket	6,0
			Jumlah PP pengganti PP No. 41 Tahun 2007 yang disahkan		1 PP ^{ki)}	
			Persentase daerah yang melaksanakan PP pengganti PP No. 41 Tahun 2007		100%	
			Jumlah laporan monitoring pelaksanaan PP pengganti PP No. 41 Tahun 2007		2 laporan ^{ki)}	

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN DALAM NEGERI

No	PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
			Jumlah laporan evaluasi pelaksanaan PP pengganti PP No. 41 Tahun 2007		1 laporan ^{ks)}	
6.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH					350,0
a.	Pembinaan dan Fasilitasi Dana Perimbangan	Peningkatan efektifitas pemanfaatan DAK sesuai Petunjuk Pelaksanaan	Persentase Provinsi, kabupaten/kota yang telah memanfaatkan DAK sesuai Petunjuk Pelaksanaan	70%	90%	15,1
		Optimalisasi penyerapan DAK oleh daerah	Persentase daerah yang telah Optimal (100%) menyerap DAK	70%	90%	
		Terwujudnya tertib administrasi Pengelolaan Keuangan Daerah yang akuntabel dan transparan	Jumlah rekomendasi kebijakan untuk dukungan materi sebagai masukan terhadap revisi UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah.	1 paket rekomendasi kebijakan	1 paket rekomendasi ^{ks)} kebijakan	
		Tersusunnya kebijakan/regulasi di bidang fasilitasi dana perimbangan yang dapat diimplementasikan di daerah	Jumlah Permendagri	6	18 ^{ks)}	
			Jumlah Surat Edaran Mendagri	2 SE	6 SE ^{ks)}	
b.	Pembinaan Administrasi Anggaran Daerah	Peningkatan kualitas belanja daerah dalam APBD	Persentase kabupaten/kota yang proporsi belanja langsungnya lebih besar dari belanja tidak langsung	30%	60%	37,6
			Persentase rata-rata belanja modal terhadap total belanja daerah (Propinsi)	26%	30%	

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN DALAM NEGERI

No	PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
		Penetapan APBD secara tepat waktu	Persentase jumlah APBD yang disahkan secara tepat waktu.	60%	90%	
c.	Pembinaan Administrasi Pendapatan dan Investasi Daerah	Meningkatnya pendapatan daerah yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah	Persentase rata-rata perolehan pajak dan retribusi daerah terhadap APBD Kab/Kota	4,60%	11,80%	30,7
			Persentase rata-rata perolehan pajak dan retribusi daerah terhadap APBD Provinsi	44,50%	48%	
		Meningkatnya Optimalisasi investasi daerah dan pengelolaan barang milik daerah	Persentase rata-rata hasil penerimaan Investasi dan barang milik daerah terhadap PAD	3%	7%	
		Meningkatnya kemampuan administrasi pendapatan dan investasi daerah	Persentase kabupaten daerah tertinggal yang memperoleh fasilitasi peningkatan kemampuan administrasi pendapatan dan investasi daerah	0%	50%	
d.	Pembinaan dan Fasilitasi Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah	Provinsi dan kabupaten/ kota memiliki Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) berstatus Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).	Persentase daerah provinsi, Kab/Kota ber-LKPD dengan status WTP.	15%	100%	21,0
		Penetapan dan penyampaian Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD secara tepat waktu	Persentase penetapan dan penyampaian Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang disahkan secara tepat waktu.	40%	90%	
7.	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN					718,0
a.	Pendidikan dan Pelatihan Bidang Pemerintahan dan Politik	Terintegrasinya seluruh diklat bagi PNS Daerah untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan, politik dan penerapan SPM di daerah	Jumlah Grand Strategy penyelenggaraan diklat	1	1 ^{k)}	42,3
			Jumlah sosialisasi Grand Strategy penyelenggaraan diklat		1 paket ^{k)}	
			Jumlah daerah pelaksana Grand Strategy penyelenggaraan diklat		33 provinsi	

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN DALAM NEGERI

No	PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
			Jumlah camat peserta diklat teknis pemerintahan	150	510 ^{K)}	
			Jumlah provinsi/angkatan diklat penguatan pemerintahan dan politik bagi anggota DPRD, pejabat pemerintahan Provinsi dan Kabupaten dan Kota, Kecamatan, Kelurahan dan Desa untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan, politik dan SPM		33 Provinsi (52 Angkatan) ^{K)}	
			Jumlah peserta orientasi pengenalan tugas bagi anggota DPRD hasil Pemilu 2014		3,000 ^{K)}	
			Jumlah angkatan diklat calon camat		3 ^{K)}	
8.	PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN					6.900,0
a.	Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu	Terlaksananya tertib administrasi kependudukan dengan tersedianya data dan informasi penduduk yang akurat dan terpadu.	Jumlah kabupaten/kota yang memberikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) kepada setiap penduduk.	497	497	6.600 (Angka sementara untuk 5 tahun. Kepastian alokasi dana pertahun menunggu penyelesaian <i>Grand Design</i>)
			Jumlah penduduk yang menerima e-KTP berbasis NIK dengan perekaman sidik jari	4,2 juta jiwa di 6 kab/kota	172 juta jiwa di 497 kab/kota ^{K)}	
b.	Pengelolaan Informasi Manajemen Kependudukan	Terlaksananya penataan sistem koneksi SIAK yang berbasis NIK dengan sistem informasi Kementerian/Lembaga melalui pembangunan dan pengembangan data warehouse berbasis data kependudukan dengan NIK Nasional	Jumlah koneksitas Kementerian/ Lembaga yang telah mengembangkan <i>data warehouse</i> berbasis data kependudukan dengan <i>data warehouse</i> NIK Nasional.	4 K/L	15 K/L ^{K)}	148,8

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN DALAM NEGERI

No	PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
			Jumlah <i>smart card</i> atau dokumen lainnya yang diterbitkan oleh Kementerian/ Lembaga yang telah mengembangkan <i>data warehouse</i> berbasis data kependudukan dengan NIK Nasional untuk peningkatan pelayanan publik	-	23 ^{k)}	
c.	Penataan Kebijakan Perkembangan Kependudukan	Terwujudnya Sistem Administrasi Kependudukan yang baik sebagai upaya reformasi pelayanan registrasi penduduk dan pencatatan sipil.	Jumlah daerah yang telah menetapkan perda sebagai amanat UU No. 23 tahun 2006 dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan	127 Kab/Kota	497 Kab/kota	15,4
			Jumlah peraturan pelaksana UU No. 23 Tahun 2006 dan peraturan tentang penyelenggaraan registrasi penduduk dan catatan sipil	4 Permendagri	18 permendagri	
9.	PROGRAM PEMBINAAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Meningkatnya komitmen dan dukungan pemangku kepentingan terhadap berjalannya proses demokratisasi dan dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa	Indeks Kinerja Lembaga Demokrasi	52,3*	70	625,8
			Indeks Kesehatan Masyarakat Sipil	-	3	
			Indeks Kebebasan Sipil	75,7*	80	
			Indeks Hak-Hak Politik	53*	70	
			Prosentase kebijakan/peraturan perundangan yang dilaksanakan oleh pemda dan para pemangku kepentingan	-	80%	
			Prosentase forum dialog publik yang efektif	-	80%	
a.	Fasilitasi Organisasi Politik dan Kemasyarakatan	Terlaksananya penyusunan kebijakan, fasilitasi dan dukungan bagi peningkatan peran organisasi politik dan kemasyarakatan	1. Prosentase kemajuan rancangan revisi terbatas UU Parpol	55%	100%	184,5
			2. Jumlah parpol yang mendapatkan fasilitasi peningkatan kapasitas	-	9 parpol	

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN DALAM NEGERI

No	PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
			3. Jumlah dokumen Indeks Kesehatan Masyarakat Sipil	-	1 Dokumen ^{K)}	
			4. Jumlah organisasi kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan kapasitas	580 Ormas, LSM dan LNL	2.580 Ormas, LSM dan LNL ^{K)}	
			5. Prosentase kemajuan rancangan revisi UU No. 8 tahun 1985 tentang Ormas	55%	100%	
			6. Prosentase kemajuan penyusunan rumusan kebijakan, perbaikan mekanisme dan prosedur penyelenggaraan kebijakan publik yang melibatkan masyarakat	-	100%	
			7. Prosentase kemajuan pengembangan <i>Democracy Trust Fund</i>	-	85%	
			8. Jumlah laporan fasilitasi pertemuan, forum dan uji publik untuk masukan penyusunan naskah akademis dan draft RPP Insentif Perpajakan.	-	3 laporan (1 laporan ^{K)} masukan hasil pertemuan/forum, 1 laporan masukan hasil uji publik, 1 laporan sosialisasi)	
			9. Prosentase kumulatif provinsi/ kabupaten/kota yang mendapatkan sosialisasi dan fasilitasi peningkatan peran FKUB	50%	85%	
			10. Jumlah dokumen evaluasi UU No 9 Tahun 1961 mengenai Pengumpulan Uang atau Barang	-	2 ^{K)}	

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN DALAM NEGERI

No	PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
			11. Jumlah publikasi <i>best practices</i> dan inovasi praktek demokrasi	-	200 ^{k)}	
			12. Prosentase kumulatif wilayah Indonesia yang mendapatkan fasilitasi peningkatan peran forum publik	-	65%	
			13. Tahapan perumusan kebijakan yang mendorong peran dan keberlanjutan organisasi politik dan kemasyarakatan dan mendorong kerja sama organisasi kemasyarakatan dengan pemda	Kajian PP tentang Partai Lokal di Aceh	PP tentang Partai Lokal di Aceh	
				Permendagri tentang Pelaksanaan Koordinasi Pemantauan Orang Asing dan Lembaga Asing	Permendagri tentang Pelaksanaan Koordinasi Pemantauan Orang Asing dan Lembaga Asing	
				Permendagri tentang Fasilitasi Pelayanan dan Pemantauan Tenaga Kerja Orang Asing	Permendagri tentang Fasilitasi Pelayanan dan Pemantauan Tenaga Kerja Orang Asing	
				25% pemda bekerja sama dengan organisasi masyarakat sipil	70 % pemda bekerja sama dengan organisasi masyarakat sipil	

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN DALAM NEGERI

No	PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
				-	PP tentang Bantuan Keuangan Parpol	
				-	Permendagri tentang Pedoman pelaksanaan Bantuan Keuangan Parpol	
			18. Tingkat kepuasan pelayanan organisasi kemasyarakatan, termasuk data basenya.	50%	75%	
b.	Fasilitasi Penanganan Konflik	Terlaksananya penyusunan kebijakan dan fasilitasi penanganan konflik	1. Prosentase kemajuan penetapan UU Penanganan Konflik	-	100%	88,1
			2. Prosentase kumulatif provinsi/ kabupaten/kota yang mendapatkan fasilitasi pembentukan dan fasilitasi pelembagaan penguatan forum dialog penyelesaian konflik	40%	75%	
			3. Jumlah angkatan aparaturnya pemda yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan manajemen konflik dan negosiasi	8	48 ^{K)}	
			4. Jumlah wilayah yang mendapatkan fasilitasi penanganan konflik berkaitan dengan aspek pemerintahan dan keamanan	6 wilayah pasca konflik (NAD, Kalteng, Sulteng, Maluku, Maluku Utara dan Papua Barat)	8 wilayah pasca konflik (NAD, Kalteng, Sulteng, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat dan NTT)	

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN DALAM NEGERI

No	PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
				-	16 wilayah rawan konflik	
				-	10 wilayah potensi konflik	
			5. Jumlah dokumen laporan situasi daerah	1 laporan puskom	5 laporan puskom ^{k)}	
			6. Jumlah paket kerjasama dengan organisasi masyarakat sipil dalam penanganan konflik	-	400 paket kerjasama ^{k)} di 33 provinsi	
c.	Pengembangan Nilai-Nilai Kebangsaan	Terlaksananya penyusunan kebijakan, dukungan dan fasilitasi pengembangan nilai-nilai kebangsaan	1. Prosentase jumlah penyelesaian rumusan kebijakan pengembangan nilai kebangsaan Indonesia yang tepat waktu	-	87%	50,4
			2. Jumlah modul pengembangan nilai kebangsaan	-	4 Modul (3 Modul Wawasan Kebangsaan dan 1 Modul Bingkai Kebangsaan) ^{k)}	

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN DALAM NEGERI

No	PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
				-	· 3 Modul (1 K) Modul Pembauran Kebangsaan, 1 Modul Pancasila sebagai Dasar Negara dan Ideologi Bangsa, 1 Modul Ketahanan Bangsa)	
				-	· 3 Modul Bela K) Negara	
				-	· 2 Modul (1 K) Modul Pengembangan Nilai- Nilai Pranata Sosial, 1 Modul Pengembangan Nilai- Nilai Budaya)	

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN DALAM NEGERI

No	PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
			3. Jumlah forum sosialisasi pengembangan nilai kebangsaan untuk pemuda, perempuan, aparatur pemerintah	-	85 ^{K)}	
			4. Jumlah peserta TOT/peningkatan kapasitas kader pembauran	-	196 orang dari 28 provinsi ^{K)}	
d.	Pembinaan dan Pengembangan Budaya Politik	Terlaksananya penyusunan kebijakan, dukungan dan fasilitasi pengembangan budaya politik yang berdasarkan pada 4 pilar negara (Pancasila, UUD NRI 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI)	1. Prosentase penyusunan rumusan kebijakan pembinaan dan pengembangan budaya politik yang akuntabel dan tepat waktu	-	90%	98,1
			2. Prosentase penyusunan rumusan kebijakan pendidikan perdamaian yang akuntabel dan tepat waktu	-	82,50%	
			3. Jumlah paket kerja sama pembinaan dan pengembangan budaya politik di wilayah miskin, terisolasi, perbatasan dan kaum marjinal	-	536 ^{K)}	
			4. Jumlah paket kerja sama sosialisasi perundang-undangan dan cinta tanah air	-	536 paket kerjasama ^{K)} di 33 provinsi	
			5. Jumlah provinsi yang mendapatkan fasilitasi pengembangan kelompok kerja demokrasi dan pendampingan pusat pendidikan kewarganegaraan	33 provinsi	33 provinsi	
			6. Jumlah akumulasi provinsi yang membangun dan memperkuat pusat pendidikan kewarganegaraan/politik rakyat	-	25 provinsi	

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN DALAM NEGERI

No	PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
			7. Jumlah materi/modul pendidikan politik bagi calon pemilih pemula	3 Modul tentang Pendidikan Politik bagi calon pemilih Pemula	15 Modul tentang Pendidikan Politik bagi calon pemilih Pemula ^{KS)}	
e.	Lembaga Perwakilan dan Partisipasi Politik	Terlaksananya penyusunan kebijakan, dukungan dan fasilitasi lembaga perwakilan dan partisipasi politik	1. Prosentase penyusunan rumusan kebijakan fasilitasi lembaga perwakilan dan pengembangan partisipasi politik yang akuntabel dan tepat waktu	50%	90%	68,5
			2. Prosentase penyusunan mekanisme partisipasi politik rakyat dalam keterlibatan penyusunan kebijakan publik dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan tepat waktu	50%	90%	
			3. Prosentase pelaksanaan fasilitasi hubungan kerja antar pemerintah dengan lembaga perwakilan	50%	90%	
			4. Jumlah forum komunikasi politik	-	12 ^{KS)}	
			5. Prosentase laporan pemantauan dan pelaporan perkembangan politik yang tepat waktu	75%	95%	
			6. Jumlah dokumen evaluasi sistem dan pelaksanaan pemilihan umum	1	5 ^{KS)}	
			7. Prosentase kemajuan penetapan rancangan revisi UU No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum	100%	100%	
			9. Prosentase kemajuan penyusunan rancangan revisi terbatas UU No. 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD	50%	100%	

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN DALAM NEGERI

No	PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
			10. Prosentase kemajuan penyusunan rancangan revisi terbatas UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD	50%	100%	
			11. Prosentase kemajuan penyusunan rancangan revisi terbatas UU No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden	50%	100%	
			12. Jumlah paket kerja sama dengan organisasi masyarakat sipil dalam peningkatan partisipasi politik perempuan	-	400 ^{ks)}	
10.	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR KEMENTERIAN DALAM NEGERI	Terpenuhinya sarana dan prasarana sesuai kebutuhan dan terlaksananya pengelolaan sarana dan prasarana kementerian.	Tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan Tupoksi Sekretariat Jenderal dan Kementerian Dalam Negeri untuk kategori fasilitas tertentu.			1.735,0
			Persentase pembangunan sarana dan prasarana kampus IPDN Daerah.	25% (4 daerah)	100%	
11.	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI	Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian sebagai bahan rekomendasi perumusan kebijakan.	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti.	45%	65%	181,0
12.	PENGAWASAN DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS APARATUR KEMENTERIAN DALAM NEGERI	Meningkatnya kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi aparatur dalam penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatnya transparansi dan akuntabilitas keuangan.	Persentase tingkat ketaatan aparatur terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di unit kerja lingkup Kemendagri	80%	90%	200,0
			Persentase tingkat ketaatan aparatur terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan di provinsi	80%	90%	

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN DALAM NEGERI

No	PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
			Persentase tingkat penyelesaian kasus-kasus dan pengaduan khusus atas Petunjuk Menteri di unit kerja lingkup Kemendagri dan Provinsi serta Kabupaten/Kota tertentu.	80%	80%	
13.	PENDIDIKAN KEPAMONGPRAJAAN	Tersedianya kader aparatur Pemerintahan Dalam Negeri yang professional dan berkualitas pada derajat program vokasi, akademik dan profesi.	Peningkatan jumlah lulusan pendidikan kader dengan predikat "Dengan Pujian" dan atau "cum laude".	4% dari jumlah praja	5% dari jumlah praja	1.262,6
			Peningkatan rata-rata nilai pendidikan (pengajaran, pelatihan, dan pengasuhan)	Naik 2,5% (0,1 dari skala 4)	Naik 2,5% (0,1 dari skala 4) dari kondisi tahun 2013	
				Nilai rata-rata ≥ 2	Nilai rata-rata ≥ 2	
TOTAL ALOKASI KEMENDAGRI 2010-2014						67.155,4

K : Angka kumulatif 5 tahun (2010-2014)

* indeks Demokrasi Indonesia Tahun 2007

**RENCANA TINDAK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH 2010-2014
PER KEMENTERIAN/LEMBAGA**

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN LUAR NEGERI

No	PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp. Miliar)
				2010	2014	
1.	Program Peningkatan Hubungan dan Politik Luar Negeri melalui Kerjasama ASEAN	Meningkatnya peran dan kepemimpinan Indonesia dalam pembentukan Komunitas ASEAN di bidang politik dan keamanan, ekonomi, dan sosial budaya.	1. % prakarsa/rekomendasi Indonesia yang diadopsi 2. % dukungan dan partisipasi masyarakat domestik terhadap pembentukan komunitas ASEAN 2015	80% 100%	80% 100%	200,1
1.1	Kerjasama ASEAN bidang Politik dan Keamanan	Terlaksananya peran Indonesia dalam mewujudkan komunitas ASEAN di bidang Politik dan Keamanan	1. Jumlah pertemuan/kegiatan/seminar/sidang yang diikuti oleh Indonesia 2. Terlaksananya grand design nasional pelaksanaan Cetak Biru Politik-Keamanan ASEAN 3. Jumlah provinsi/wilayah daerah yang telah memperoleh sosialisasi tentang Cetak Biru ASEAN bidang Politik dan Keamanan 4. Jumlah pelaksanaan kegiatan terkait dengan dukungan RI kepada Timor Leste dalam upaya menjadi anggota ASEAN. 5. Jumlah kegiatan terkait pelaksanaan Pertemuan Resmi ASEAN dan Persiapan Indonesia menjadi Ketua ASEAN pada 2013.	68 Penjabaran kerangka implementasi Cetak Biru Politik-Keamanan ASEAN 7 10 2	350 ^{K)} 80% terlaksana 33 ^{K)} 38 ^{K)} 11 ^{K)}	43,9

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN LUAR NEGERI

No	PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp. Miliar)
				2010	2014	
1.2	Kerjasama ASEAN bidang Ekonomi	Terlaksananya peran Indonesia dalam mewujudkan komunitas ASEAN di bidang ekonomi dengan karakteristik utama pasar tunggal dan basis produksi, kawasan ekonomi berdaya saing tinggi, kawasan dengan pembangunan ekonomi yang merata dan kawasan yang terintegrasi penuh dengan ekonomi global	1. % partisipasi Indonesia dalam pertemuan/kegiatan/seminar/sidang	100 % keikutsertaan dalam sidang, dan 76 kertas posisi	100 % keikutsertaan dalam sidang, dan 407 kertas posisi ^{K)}	21,7
			2. % partisipasi dalam upaya menjaga sentralitas ASEAN dalam hubungan ekonomi dengan mitra wicara (sidang dengan mitra wicara)	100 % keikutsertaan dalam sidang, dan 20 kertas posisi	100 % keikutsertaan dalam sidang, dan 100 kertas posisi ^{K)}	
			3. Jumlah kegiatan dalam rangka meningkatkan pemahaman publik mengenai integrasi ekonomi ASEAN	8 kegiatan, di Pulau Jawa	40 kegiatan di Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua ^{K)}	
1.3	Kerjasama ASEAN bidang Fungsional	Terlaksananya peran Indonesia dalam mewujudkan komunitas ASEAN di bidang Sosial Budaya	1. Jumlah pertemuan/kegiatan/seminar/sidang yang diikuti oleh Indonesia	38	195 ^{K)}	22,0
			2. Jumlah pertemuan koordinasi kerjasama Fungsional/Sosial-Budaya ASEAN dalam rangka ASEAN Senior Official Committee mengenai ASCC di luar negeri	2	11 ^{K)}	
			3. Jumlah rapat koordinasi teknis dengan instansi teknis terkait dalam rangka persiapan sidang terkait kebijakan politik luar negeri	4	22 ^{K)}	
			4. Jumlah kegiatan sosialisasi perkembangan isu-isu di bidang Sosial-Budaya dalam kerangka ASEAN kepada masyarakat	5 kali kegiatan sosialisasi dan 1 kali event internasional	22 kali kegiatan sosialisasi dan 7 kali event internasional ^{K)}	
			5. % provinsi yang telah memperoleh sosialisasi mengenai Cetak Biru Sosial-Budaya ASEAN kepada masyarakat dan guru SMP/SMA	20% (7 provinsi dari 33 provinsi)	100% (33 provinsi) ^{K)}	

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN LUAR NEGERI

No	PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp. Miliar)
				2010	2014	
1.4	Kerjasama ASEAN dengan Mitra Wicara dan Antar Kawasan	Terlaksananya peran Indonesia dalam mewujudkan Kawasan ASEAN yang Dinamis dan Outward-Looking (kerjasama ASEAN-Australia, China, Canada, Uni Eropa, India, Jepang, Selandia Baru, Republik Korea, Rusia, Amerika Serikat, ASEAN+3, negara-negara East Asia Summit, PBB, Gulf Cooperation Council, MERCOSUR, dan Pakistan	1. Jumlah pertemuan/sidang dalam rangka implementasi kesepakatan kerjasama di bidang politik, ekonomi, sosial budaya	60	300 ^{K)}	14,6
			2. Jumlah kegiatan dalam rangka meningkatkan pemahaman publik mengenai hubungan ASEAN dengan Mitra Wicara serta perkembangan dan tindak lanjut implementasi <i>Plan of Action</i> kerjasama ASEAN dengan Mitra Wicara	4	22 ^{K)}	
2.	Program Peningkatan Peran dan Diplomasi Indonesia di Bidang Multilateral	Meningkatnya peran dan diplomasi Indonesia dalam penanganan isu multilateral	1. Tingkat keberhasilan rekomendasi/ gagasan Pemri yang diterima dalam sidang terkait penanganan isu-isu multilateral dan pemajuan kerjasama multilateral	70%	70%	1.787,5
			2. Tingkat dukungan lintas sektoral dalam penanganan isu-isu multilateral dan implementasi kesepakatan multilateral	80%	80%	
			3. Tingkat keberhasilan pencalonan pemerintah/ individu dalam keanggotaan/jabatan pada badan di berbagai fora internasional	60%	60%	
2.1	Kerjasama Multilateral terkait Isu Keamanan Internasional, Senjata Pemusnah Massal dan Senjata Konvensional, Penanggulangan Kejahatan Lintas Negara dan Terorisme	Terlaksananya partisipasi Indonesia dalam forum kerja sama multilateral	1. Jumlah prakarsa Indonesia untuk mendorong reformasi Dewan Keamanan PBB.	4	20 ^{K)}	20,6
			2. Jumlah posisi pemri yang disampaikan dalam sidang internasional	10	50 ^{K)}	
			3. Jumlah koordinasi teknis	19	119 ^{K)}	
			4. Jumlah partisipasi Indonesia pada sidang internasional	7	35 ^{K)}	
			5. Jumlah penyelenggaraan pertemuan internasional (Indonesia sebagai tuan rumah)	-	3 ^{K)}	

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN LUAR NEGERI

No	PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp. Miliar)
				2010	2014	
2.2	Kerjasama Multilateral Dalam Rangka Pemajuan dan Perlindungan HAM serta Penanganan Isu Kemanusiaan	Terlaksananya partisipasi Indonesia dalam forum kerja sama multilateral tentang pemajuan dan perlindungan HAM serta penanganan isu kemanusiaan termasuk penanganan isu residual Timor-Timur, dan penanganan isu kemanusiaan pada tingkat nasional	1. Jumlah koordinasi teknis	28	196	40,0
			2. Jumlah penyelenggaraan pertemuan/kerjasama internasional	12	60	
			3. Jumlah partisipasi Indonesia pada sidang internasional	4	226	
			4. Jumlah posisi Pemri yang disampaikan dalam sidang internasional	5	227	
2.3	Kerjasama Multilateral Terkait Isu Perdagangan, Perindustrian, Investasi, dan HAKI	Terlaksananya partisipasi Indonesia dalam setiap forum kerja sama multilateral tentang Perdagangan, Perindustrian, Investasi, dan HAKI	1. Jumlah posisi Pemri yang disampaikan dalam sidang internasional	17	107	22,8
			2. Jumlah koordinasi teknis	21	109	
			3. Jumlah penyelenggaraan pertemuan/kerjasama internasional	2	10	
			4. Jumlah partisipasi Indonesia dalam sidang internasional	10	60	
2.4	Kerjasama Multilateral Terkait Isu Pembangunan Ekonomi, Keuangan, dan Lingkungan Hidup	Terlaksananya partisipasi Indonesia dalam setiap forum kerja sama multilateral tentang pembangunan ekonomi, keuangan, dan lingkungan hidup serta pembangunan sektoral	1. Jumlah Posisi pemri yang disampaikan dalam sidang internasional	8	40	26,3
			2. Jumlah koordinasi teknis	52	260	
			3. Jumlah penyelenggaraan pertemuan/kerjasama internasional	2	6	
			4. Jumlah partisipasi Indonesia dalam sidang regional dan multilateral	27	135	
2.5	Kerjasama Multilateral Terkait Isu Sosial Budaya dan Organisasi Internasional Negara Berkembang	Terlaksananya partisipasi Indonesia dalam setiap forum kerja sama multilateral tentang sosial budaya dan organisasi internasional negara berkembang	1. Jumlah posisi Pemri yang disampaikan dalam sidang internasional	22	107	32,7
			2. Jumlah koordinasi teknis	16	80	
			3. Jumlah penyelenggaraan pertemuan/kerjasama internasional	-	2	
			4. Jumlah partisipasi Indonesia dalam sidang internasional	23	133	

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN LUAR NEGERI

No	PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp. Miliar)
				2010	2014	
			5. Jumlah pertemuan tentang LSM Asing	20	106 ^{K)}	
			6. Tersusunnya grand design kerjasama Selatan-Selatan	-	Tersusunnya grand design kerjasama Selatan-Selatan	
3.	Program Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri serta Optimalisasi Diplomas di Kawasan Asia Pasifik dan Afrika	Meningkatnya kerjasama RI dengan negara-negara di kawasan Asia Pasifik dan Afrika	1. % prakarsa/rekomendasi Indonesia yang diadopsi	70%	70%	215,7
			2. Tingkat kelancaran hubungan dan kerjasama bilateral di berbagai bidang.	80%	80%	
3.1	Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri di Kawasan Asia Timur dan Pasifik	Terlaksananya peran Indonesia dalam kerjasama di bidang politik, keamanan, ekonomi, dan sosial budaya dengan negara-negara di kawasan Asia Timur dan Pasifik	1. % fasilitasi penyelenggaraan kerjasama	100%	100%	27,8
			2. Jumlah dokumen implementasi kesepakatan	15	82 ^{K)}	
			3. Jumlah kunjungan/ Pernyataan dukungan Kepala Negara/Pemerintahan dan Pejabat Tinggi dari/ke negara-negara di kawasan Asia Timur dan Pasifik	4	51 ^{K)}	
			4. Jumlah rekomendasi/prakarsa Indonesia dalam mendukung upaya perdamaian di kawasan Asia Timur dan Pasifik	5	14 ^{K)}	
			5. % fasilitasi untuk sidang/pameran/forum bisnis (<i>Trade, Tourism and Investment</i>)	100%	100%	
			6. Tingkat penanganan isu <i>illegal migrant</i> dan <i>human trafficking</i> serta isu-isu lainnya	25%	25%	
			7. Jumlah pelaksanaan koordinasi teknis	30	200 ^{K)}	
3.2	Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri di Kawasan Asia Selatan dan Tengah	Terlaksananya peran Indonesia dalam kerjasama di bidang politik, keamanan, ekonomi, dan sosial budaya dengan negara-negara di kawasan Asia Selatan dan Tengah	1. % fasilitasi penyelenggaraan kerjasama	100%	100%	18,8
			2. Jumlah dokumen implementasi kesepakatan	8	52 ^{K)}	
			3. Jumlah kunjungan/ Pernyataan dukungan Kepala Negara/Pemerintahan dan Pejabat Tinggi dari/ke negara-negara di kawasan Asia Selatan dan Tengah	8	46 ^{K)}	

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN LUAR NEGERI

No	PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp. Miliar)
				2010	2014	
			4. Jumlah rekomendasi/prakarsa Indonesia dalam mendukung upaya perdamaian di kawasan Asia Selatan dan Tengah	2	16 ^{K)}	
			5. % fasilitasi untuk sidang/pameran/forum bisnis (<i>Trade, Tourism and Investment</i>)	100%	100%	
			6. Tingkat penanganan isu <i>illegal migrant</i> dan <i>human trafficking</i> serta isu-isu lainnya	25%	25%	
			7. Jumlah koordinasi teknis	30	200 ^{K)}	
3.3	Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri di Kawasan Sub Sahara Afrika	Terlaksananya peran Indonesia dalam kerjasama di bidang politik, keamanan, ekonomi, dan sosial budaya dengan negara-negara di kawasan Sub Sahara Afrika	1. % fasilitasi penyelenggaraan kerjasama	100%	100%	22,4
			2. Jumlah dokumen implementasi kesepakatan	3	24 ^{K)}	
			3. Jumlah kunjungan/ Pernyataan dukungan Kepala Negara/Pemerintahan dan Pejabat Tinggi dari negara-negara di kawasan Sub Sahara Afrika dan pernyataan dukungan resmi dari negara-negara kawasan Sub Sahara Afrika terhadap NKRI	17	92 ^{K)}	
			4. Jumlah rekomendasi/prakarsa Indonesia dalam mendukung upaya perdamaian di kawasan Sub Sahara Afrika	4	24 ^{K)}	
			5. % fasilitasi untuk sidang/pameran/forum bisnis (<i>Trade, Tourism and Investment</i>)	100%	100%	
			6. Jumlah koordinasi teknis	30	200 ^{K)}	
3.4	Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri di Kawasan Timur Tengah	Terlaksananya peran Indonesia dalam kerjasama di bidang politik, keamanan, ekonomi, dan sosial budaya dengan negara-negara di kawasan Timur Tengah	1. % fasilitasi penyelenggaraan kerjasama	100%	100%	18,4
			2. Jumlah dokumen implementasi kesepakatan	8	52 ^{K)}	
			3. Jumlah kunjungan/ Pernyataan dukungan Kepala Negara/Pemerintahan dan Pejabat Tinggi dari negara-negara di kawasan Timur Tengah dan pernyataan dukungan resmi dari negara-negara kawasan Timur Tengah terhadap NKRI	12	63 ^{K)}	

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN LUAR NEGERI

No	PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp. Miliar)
				2010	2014	
			4. Jumlah rekomendasi/prakarsa Indonesia dalam mendukung upaya perdamaian di kawasan Timur Tengah (Palestina, Irak, Lebanon dan Sudan)	6	38 ^{K)}	
			5. % fasilitasi untuk sidang/pameran/forum bisnis (<i>Trade, Tourism and Investment</i>)	100%	100%	
			6. Jumlah koordinasi teknis	30	200 ^{K)}	
3.5	Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri Melalui Kerjasama Intra Kawasan Asia Pasifik dan Afrika	Terlaksananya peran Indonesia dalam kerjasama di bidang politik, keamanan, ekonomi, dan sosial budaya di berbagai forum Kerjasama Intra Kawasan Asia Pasifik dan Afrika (APEC, ARF, ACD, NAASP, AMED, SwPD, PIF, IOR-ARC, CTI, BIMP-EAGA, IMT-GT, dll)	1. Jumlah partisipasi Indonesia pada sidang/pertemuan	68	372 ^{K)}	41,0
			2. Tingkat penyampaian posisi Delri dalam mencegah pencantuman isu separatisme di Indonesia dalam dokumen akhir sidang	100%	100%	
			3. Jumlah dokumen implementasi kesepakatan	8	48 ^{K)}	
			4. Jumlah penyelenggaraan sidang/sosialisasi/seminar mengenai kebijakan luar negeri RI	10	60 ^{K)}	
			5. Jumlah prakarsa/inisiatif/rekomendasi Indonesia yang diterima	11	61 ^{K)}	
			6. Jumlah koordinasi teknis	40	270 ^{K)}	
4.	Program Optimalisasi Diplomasi Terkait dengan Pengelolaan Hukum dan Perjanjian Internasional	Meningkatnya diplomasi bidang hukum dan perjanjian internasional	1. Tingkat kemajuan perundingan yang terkait dengan masalah perbatasan (kualitatif)	20%	100%	166,2
			2. Tingkat kepastian perumusan perjanjian internasional yang melindungi kepentingan nasional	100%	100%	
4.1	Optimalisasi Diplomasi terkait dengan Perjanjian Politik, Keamanan Kewilayahan dan Kelautan	Terseleenggaranya penguatan diplomasi melalui optimalisasi perjanjian politik, keamanan, kewilayahan dan kelautan	1. Jumlah telaahan dalam proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan politik luar negeri	14	70 ^{K)}	64,2
			2. Jumlah telaahan terhadap persoalan-persoalan hukum internasional	13	65 ^{K)}	
			3. Jumlah pelaksanaan ratifikasi, penerapan hukum, penyelesaian sengketa hukum, dan perjanjian internasional	6	30 ^{K)}	

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN LUAR NEGERI

No	PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp. Miliar)
				2010	2014	
			4. Jumlah standar, norma, pedoman, kriteria, prosedur, dan pemberian bimbingan teknis, serta evaluasi pembuatan perjanjian internasional	49	245 ^{K)}	
			5. Jumlah pelaksanaan perundingan yang terkait dengan pembuatan perjanjian bilateral, regional, dan multilateral antara RI-Malaysia, Filipina, Singapura, Timor Leste, Vietnam, dan Palau	12	60 ^{K)}	
			6. Tersusunnya dokumen tentang Ocean Policy	Penyusunan Rancangan Dokumen tentang Ocean Policy	Tersedianya dokumen tentang Ocean Policy	
5	Program Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri serta Optimalisasi Diplomasi di kawasan Amerika dan Eropa	Meningkatnya kerjasama di berbagai bidang antara RI dengan negara-negara dan organisasi intrakawasan di kawasan Amerop	1. % prakarsa/rekomendasi Indonesia yang diadopsi	70%	70%	163,7
			2. Tingkat kelancaran hubungan dan kerjasama bilateral di berbagai bidang.	80%	80%	
5.1	Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri di Kawasan Amerika Utara dan Tengah	Terlaksananya peran Indonesia dalam kerjasama di bidang politik, keamanan, ekonomi, dan sosial budaya dengan negara-negara di Kawasan Amerika Utara dan Tengah	1. Jumlah penyelenggaraan pertemuan di Indonesia	12	74 ^{K)}	11,6
			2. Jumlah penyelenggaraan pertemuan di negara-negara kawasan Amerika Utara dan Tengah	19	99 ^{K)}	
			3. Jumlah kunjungan pejabat tinggi dan senior dari/ke negara-negara di kawasan Amerika Utara dan Tengah	6	40 ^{K)}	
			4. Jumlah dokumen implementasi kesepakatan	15	89 ^{K)}	
			5. % fasilitasi untuk pameran/forum bisnis di bidang ekonomi, perdagangan, investasi dan pariwisata	100%	100%	
			6. Jumlah koordinasi teknis (interdep)	90	482 ^{K)}	
			7. Jumlah keikutsertaan dalam pameran dan kegiatan kebudayaan di negara-negara Amerika Utara dan Tengah	-	32 ^{K)}	

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN LUAR NEGERI

No	PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp. Miliar)
				2010	2014	
5.2	Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri di Kawasan Amerika Selatan dan Karibia	Terlaksananya peran Indonesia dalam kerjasama di bidang politik, keamanan, ekonomi, dan sosial budaya dengan negara-negara di kawasan Amerika Selatan dan Karibia	1. Jumlah penyelenggaraan pertemuan di Indonesia	4	16 ^{K)}	10,9
			2. Jumlah penyelenggaraan pertemuan di negara-negara kawasan Amerika Selatan dan Karibia	6	32 ^{K)}	
			3. Jumlah kunjungan pejabat tinggi dari/ke negara-negara di kawasan Amerika Selatan dan Karibia	5	31 ^{K)}	
			4. Jumlah dokumen implementasi kesepakatan	11	59 ^{K)}	
			5. % fasilitasi untuk pameran/forum bisnis di bidang ekonomi, perdagangan, investasi dan pariwisata	100%	100%	
			6. Jumlah koordinasi teknis (interdep)	30	144 ^{K)}	
			7. Jumlah keikutsertaan dalam pameran dan kegiatan kebudayaan di negara-negara Amerika Selatan dan Karibia	1	25 ^{K)}	
5.3	Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri di Kawasan Eropa Barat	Terlaksananya peran Indonesia dalam kerjasama di bidang politik, keamanan, ekonomi, dan sosial budaya dengan negara-negara di kawasan Eropa Barat	1. Jumlah penyelenggaraan pertemuan di Indonesia	8	42 ^{K)}	10,9
			2. Jumlah penyelenggaraan pertemuan di negara-negara kawasan Eropa Barat	7	42 ^{K)}	
			3. Jumlah kunjungan tingkat pejabat tinggi dari/ke negara-negara di kawasan Eropa Barat	10	55 ^{K)}	
			4. Jumlah dokumen implementasi kesepakatan	9	48 ^{K)}	
			5. % fasilitasi untuk pameran/forum bisnis di bidang ekonomi, perdagangan, investasi dan pariwisata	100%	100%	
			6. Jumlah koordinasi teknis (interdep)	35	187 ^{K)}	
			7. Jumlah keikutsertaan dalam pameran dan kegiatan kebudayaan di negara-negara Eropa Barat	2	26 ^{K)}	

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN LUAR NEGERI

No	PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp. Miliar)
				2010	2014	
5.4	Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri di Kawasan Eropa Tengah dan Timur	Terlaksananya peran Indonesia dalam kerjasama di bidang politik, keamanan, ekonomi, dan sosial budaya dengan negara-negara di Kawasan Eropa Tengah dan Timur	1. Jumlah penyelenggaraan pertemuan di Indonesia	5	30 ^{K)}	10,7
			2. Jumlah penyelenggaraan pertemuan di negara-negara kawasan Eropa Tengah dan Timur	5	33 ^{K)}	
			3. Jumlah kunjungan tingkat pejabat tinggi dari/ke negara-negara di kawasan Eropa Tengah dan Timur	2	13 ^{K)}	
			4. Jumlah dokumen implementasi kesepakatan	10	61 ^{K)}	
			5. % fasilitasi untuk pameran/forum bisnis di bidang ekonomi, perdagangan, investasi dan pariwisata	100%	100%	
			6. Jumlah koordinasi teknis (interdep)	25	137 ^{K)}	
5.5	Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri Melalui Kerjasama Intrakawasan Amerika dan Eropa	Terlaksananya peran Indonesia dalam kerjasama di bidang politik, keamanan, ekonomi, dan sosial budaya di Organisasi Intrakawasan Amerika dan Eropa	1. Jumlah kerjasama yang disepakati antara RI melalui kerjasama intrakawasan Amerika dan Eropa	11	64 ^{K)}	24,4
			2. Jumlah prakarsa/rekomendasi Indonesia dalam kerjasama FEALAC	6	34 ^{K)}	
			3. Jumlah prakarsa/rekomendasi Indonesia dalam kerjasama ASEM	4	20 ^{K)}	
			4. Jumlah penyelenggaraan sidang/pertemuan dalam rangka optimalisasi diplomasi intrakawasan Amerika dan Eropa	12	65 ^{K)}	
			5. Jumlah sidang/pertemuan yang dihadiri dalam rangka optimalisasi diplomasi intrakawasan Amerika dan Eropa	37	195 ^{K)}	
			6. % fasilitasi untuk pameran/forum bisnis di bidang ekonomi, perdagangan, investasi dan pariwisata dalam kerjasama intra kawasan	100%	100%	
			7. Jumlah koordinasi teknis (interdep)	30	165 ^{K)}	
			8. Jumlah keikutsertaan dalam pameran dan kegiatan kebudayaan di kawasan Amerika dan Eropa	2	12 ^{K)}	

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN LUAR NEGERI

No	PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp. Miliar)
				2010	2014	
6	Program Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Luar Negeri	Meningkatnya Kualitas Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan di Bidang Hubungan dan Politik Luar Negeri RI	% rekomendasi kebijakan politik luar negeri yang ditindaklanjuti sebagai kebijakan Kementerian Luar Negeri	70%	100%	108,2
7	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Keprotokol dan Kekonsuleran	Meningkatnya kualitas pelayanan keprotokol dan konsuleran	Tingkat pelayanan keprotokol, konsuleran, fasilitas diplomatik dan perlindungan WNI/BHI yang memadai dan tepat waktu	100%	100%	1.249,4
7.1	Peningkatan perlindungan dan pelayanan WNI/BHI di Luar Negeri	Terlaksananya pelayanan dan perlindungan WNI/BHI	1. Jumlah pertemuan dengan negara sahabat terkait perlindungan WNI/BHI dengan negara lain 2. Jumlah Citizen Services yang diperkuat 3. Jumlah WNI/TKI yang memperoleh fasilitas di penampungan 4. Jumlah WNI/TKI yang direpatriasi 5. Jumlah WNI/TKI yang dideportasi 6. % pemberian bantuan hukum (advokasi dan lawyer) bagi WNI terutama tenaga kerja wanita 7. Jumlah laporan monitoring dan evaluasi pelayanan dan perlindungan WNI/TKI 8. Jumlah sosialisasi untuk PJTKI tentang pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri 9. Jumlah koordinasi dengan instansi terkait baik di dalam maupun di luar negeri 10. Tersedianya <i>database</i> mengenai penyebaran WNI terdaftar di seluruh perwakilan di luar negeri 11. Jumlah buku saku/ <i>leaflet</i> tentang informasi pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri 12. Jumlah kota yang menjadi program diseminasi perlindungan WNI melalui media elektronik 13. Jumlah tayangan iklan tentang pelayanan dan perlindungan WNI/BHI di luar negeri	5 24 - - - - - 3 65 Database WNI/BHI di seluruh perwakilan 1 15 6	35 ^{K)} 120 ^{K)} 14998 14998 ^{K)} 24020 ^{K)} 100% 96 ^{K)} 15 ^{K)} 390 ^{K)} Database WNI/BHI di seluruh perwakilan 9 ^{K)} 125 ^{K)} 76 ^{K)}	1.120,3

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN LUAR NEGERI

No	PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp. Miliar)
				2010	2014	
8.	Program Optimalisasi Informasi dan Diplomasi Publik	Meningkatnya kualitas informasi dan diplomasi publik	1. Tingkat keandalan konten dan metode penyebaran informasi tentang Indonesia 2. Tingkat persepsi positif masyarakat internasional terhadap Indonesia 3. Tingkat pemahaman publik Indonesia tentang pentingnya diplomasi	100% Baik Baik	100% Baik Baik	311,8
8.1	Penguatan Citra Indonesia Melalui Diplomasi Publik	Terselenggaranya kegiatan pemberian dukungan publik di dalam dan luar negeri bagi pelaksanaan politik luar negeri RI	1. Jumlah koordinasi dalam rangka meningkatkan kualitas diplomasi publik 2. Tingkat penyelesaian legal matters Museum KAA 3. Jumlah pelaksanaan kegiatan dalam rangka diplomasi publik, baik di dalam negeri maupun di luar negeri khususnya terkait isu demokrasi, interfaith dialogue, global media dialogue, dan cultural exchange 4. Jumlah penyelenggaraan pertemuan internasional di bidang diplomasi publik	3 kali Updates from the Regions 50 % Penyelesaian Legal Matters MKAA Bandung 21 1 kali penyelenggaraan BDF (3 rangkaian kegiatan Bali Democracy Forum : workshop, BDF EGPM, BDF , operasionalisasi Sekretariat IDP, Publikasi)	22 kali Updates from the Regions ^{K)} 100 % Penyelesaian Legal Matters MKAA Bandung 120 ^{K)} 5 kali penyelenggaraan ^{K)} BDF(48 rangkaian kegiatan Bali Democracy Forum : workshop, BDF EGPM, BDF, operasionalisasi Sekretariat IDP, Publikasi)	115,9

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN LUAR NEGERI

No	PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp. Miliar)
				2010	2014	
			5. Jumlah diseminasi informasi mengenai kebijakan luar negeri dan pelaksanaan tugas Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI di luar negeri kepada publik dalam dan luar negeri.	20	117 ^{K)}	
			6. Jumlah Promosi dan Community Outreach Museum KAA	8	40 ^{K)}	
			7. Revitalisasi Museum KAA (tergantung dari penyelesaian legal matters MCAA)	100 % Revitalisasi Museum KAA	100 % Revitalisasi Museum KAA	
8.2	Penguatan Citra Indonesia Melalui Kerjasama Teknik	Terlaksananya kebijakan di bidang kerjasama teknik yang berkualitas	1. Jumlah koordinasi dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan kerjasama teknik	-	28 ^{K)}	32,0
			2. Jumlah pelaksanaan kegiatan kerjasama teknis di berbagai bidang dengan negara-negara sahabat.	2	10 ^{K)}	
			3. Jumlah pelaksanaan kegiatan kerjasama teknik yang diberikan Indonesia dalam rangka kerjasama Selatan-Selatan	7	27 ^{K)}	
			4. % Penguatan entitas untuk melakukan koordinasi dan sinergi antar lembaga dalam melaksanakan kerjasama Selatan-Selatan	100%	100%	
9	Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Kementerian Luar Negeri	Meningkatnya Kualitas Pengawasan pada Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI	1. Opini audit BPK	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	124,2
			2. % pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan rencana	75%	90%	

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN LUAR NEGERI

No	PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp. Miliar)
				2010	2014	
10	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Luar Negeri	Meningkatnya dukungan manajemen dan teknis pelaksanaan diplomasi Indonesia	% penyelenggaraan dukungan manajemen yang profesional, akuntabel (sesuai peraturan perundangan), efisien (tepat sasaran) dan efektif (tepat guna)	70%	90%	24.455,9
11	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kementerian Luar Negeri	Meningkatnya kualitas dukungan sarana dan prasarana Kementerian Luar Negeri	Tingkat dukungan sarana dan prasarana aparatur Kementerian Luar Negeri	100%	100%	2.072,8
TOTAL ALOKASI KEMENTERIAN LUAR NEGERI 2010-2014						30.855,6

K : Angka kumulatif 5 tahun (2010-2014)

**RENCANA TINDAK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH 2010-2014
PER KEMENTERIAN/LEMBAGA**

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTAHANAN

NO	PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
A. DEPHAN						279.862,5
1.	Program dukungan Manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya UO. Dephan	Meningkatnya pelaksanaan manajemen yang terintegrasi dan akuntabel berdasarkan data yang up-to-date dan akurat di lingkungan Dephan	Persentase manajemen yang terintegrasi dan akuntabel berdasarkan data yang up-to-date dan akurat di lingkungan Dephan	80%	80%	5.750,4
2.	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Dephan	Meningkatnya kinerja dan akuntabilitas aparatur Dephan	Persentase satuan kerja mencapai target kinerjanya dgn administrasi yg akuntabel sesuai SOP	90%	90%	78,5
3.	Program Penelitian dan Pengembangan Dephan	Mewujudkan teknologi dan sumber daya pertahanan sesuai kemajuan IPTEK dan mampu dikembangkan secara mandiri	Persentase sarana dan prasarana pertahanan memenuhi kebutuhan dan standar mutu, sesuai kemajuan IPTEK serta dikem-bangkan secara mandiri	25%	25%	111,9
a	Penelitian, dan pengembangan alat peralatan pertahanan	Terwujudnya model dan/ atau prototype alat peralatan pertahanan matra darat, matra laut dan matra udara yang sesuai kemajuan IPTEK dan mampu dikembangkan secara mandiri	Persentase prototype alat peralatan pertahanan matra darat, matra laut dan matra udara yang mampu dikembangkan secara mandiri	30%	30%	19,3
4.	Program Pendidikan dan Pelatihan Dephan/TNI	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan Dephan/TNI memenuhi standar mutu, menerapkan kemajuan IPTEK serta mampu menjawab tantangan tugas untuk menghasilkan lulusan yang profesional	Persentase lulusan yang profesional melalui Diklat yang memenuhi standar mutu dan menerapkan kemajuan IPTEK	75%	75%	456,8
a	Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Badiklat Dephan	Meningkatnya perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan berdasarkan data yang up-to-date dan akurat secara terintegrasi akuntabel dan tepat waktu dilingkungan Badiklat Dephan	Persentase perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan berdasarkan data yang up-to-date dan akurat secara terintegrasi, akuntabel dan tepat waktu dilingkungan Badiklat Dephan	90%	90%	95,7
b.	Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Pertahanan	Meningkatnya kualitas pendidikan tinggi bidang pertahanan	Persentase lulusan yang menguasai pengetahuan bidang pertahanan	40%	43%	230,1
5.	Program Strategi Pertahanan	Terwujudnya kebijakan strategi pertahanan negara yang terintegrasi dalam menghadapi ancaman, gangguan, hambatan, tantangan dan peluang baik nasional, regional dan global	Persentase rumusan kebijakan strategi pertahanan negara yang terintegrasi dalam menghadapi ancaman, gangguan, hambatan, tantangan dan peluang baik nasional, regional dan global	50%	50%	219,3

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTAHANAN

NO	PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
a	Analisa Strategis	Terlaksananya prediksi ancaman, gangguan, hambatan, tantangan dan peluang baik nasional, regional dan global secara tepat waktu dengan data yang up-to-date dan akurat	Persentase cakupan prediksi ancaman, gangguan, hambatan, tantangan dan peluang baik nasional, regional dan global secara tepat waktu dengan data yang up-to-date dan akurat	40%	40%	40,2
b.	Perumusan Kebijakan Strategis dan Kebijakan Implementatif	Tersusunnya kelengkapan kebijakan pertahanan negara yang mampu memenuhi kebutuhan nasional dan tantangan global serta diimplementasikan secara sinergis lintas sektor	Persentase kelengkapan kebijakan pertahanan negara yang mampu memenuhi kebutuhan nasional dan tantangan global serta diimplementasikan secara sinergis lintas sektor	45%	45%	40,2
6.	Program Perencanaan Umum dan Penganggaran Pertahanan	Terwujudnya perencanaan umum dan penganggaran pertahanan yang terintegrasi, akuntabel, tepat waktu dan mampu memenuhi kebutuhan	Persentase perencanaan umum dan penganggaran pertahanan yang terintegrasi, akuntabel, tepat waktu dan mampu memenuhi kebutuhan	50%	50%	2.020,3
7.	Program Potensi Pertahanan	Meningkatnya masyarakat, sumber daya alam/ buatan dan sarana prasarana nasional berdaya guna secara optimal dalam rangka penyelenggaraan pertahanan negara	Persentase seluruh masyarakat, sumber daya alam/buatan dan sarana prasarana nasional berdaya guna secara optimal dalam rangka penyelenggaraan pertahanan negara	50%	50%	162,6
a	Pembinaan kesadaran bela negara	Terlaksananya penerapan nilai-nilai bela negara pada masyarakat	Indeks penerapan nilai-nilai bela negara pada masyarakat	25%	25%	19,7
b.	Pembentukan dan pembinaan komponen cadangan	Terbentuknya komponen cadangan sesuai postur pertahanan secara akuntabel	Persentase terbentuknya komponen cadangan sesuai postur pertahanan secara akuntabel	20%	20%	17,6
c.	Penataan dan Pembinaan Komponen Pendukung	Tertata dan terbinanya komponen pendukung secara terintegrasi dengan data yang up-to-date, akurat dan siap digunakan	Jumlah komponen pendukung secara terintegrasi dengan data yang up-to-date, akurat dan siap digunakan	20%	20%	20,1
8.	Program Kekuatan Pertahanan	Terwujudnya kekuatan pertahanan negara yang mampu mengidentifikasi, menangkal, menindak ancaman secara terintegrasi dan tepat waktu	Persentase kekuatan pertahanan negara yang mampu mengidentifikasi, menangkal, menindak ancaman secara terintegrasi dan tepat waktu	30%	30%	251,7
9.	Program Manajemen pembangunan sarana prasarana pertahanan	Meningkatnya industri, sarana dan prasarana pertahanan yang memenuhi kebutuhan dan standar mutu, sesuai kemajuan IPTEK serta dikembangkan secara mandiri	Persentase industri, sarana dan prasarana pertahanan yang memenuhi kebutuhan dan standar mutu, sesuai kemajuan IPTEK serta dikembangkan secara mandiri	40%	40%	1.134,2
a	Pembangunan sarana dan prasarana pertahanan di wilayah perbatasan	Meningkatnya jumlah sarana dan prasarana pertahanan di wilayah perbatasan	Persentase kecukupan jumlah sarana dan prasarana kebijakan pertahanan di wilayah perbatasan	10%	14%	12,9

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTAHANAN

NO	PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
10.	Program Pengembangan teknologi dan industri pertahanan	Meningkatnya jumlah kebutuhan Alutsista produksi dalam negeri terpenuhi secara bertahap	Persentase penggunaan potensi kebutuhan Alutsista produksi dalam negeri terpenuhi secara bertahap	20%	22%	7.100,0
a.	Penyusunan Rencana induk, master plan dan road map revitalisasi industri pertahanan	Tersusunnya rencana pengembangan & pengadaan alutsista TNI dan Alut Polri 2010 – 2014	Dokumen rencana pengembangan dan pengadaan	50%	100% K)	0,0
b.	Konsolidasi RPJMN 2010-2014 beserta RKP, Penguatan basis pendanaan, dan Perumusan Kerangka Pendanaan 5 tahun	Tersusunnya mekanisme pendanaan Industri Pertahanan dalam negeri yang bersifat multiyears	Rumusan pendanaan Industri Pertahanan Dalam Negeri yang bersifat multiyears	100%	100% K)	0,0
c.	Revisi Keppres 80 Tahun 2003 untuk mendukung revitalisasi industri pertahanan	Tersedianya payung hukum untuk mendukung revitalisasi industri pertahanan	Ditetapkannya Keppres Pengadaan barang dan jasa	100%	100% K)	0,0
d.	Identifikasi teknologi – Alutsista TNI dan Alut POLRI yang dibutuhkan dalam PJP I	Tersedianya data kemampuan produksi alutsista TNI dan Alut Polri oleh Industri Pertahanan dalam Negeri	Jumlah item produk alutsista TNI dan Alut Polri yang mampu diproduksi oleh Industri Pertahanan dalam Negeri	25%	100% K)	0,0
e.	Pembentukan Komite Kebijakan Industri Pertahanan sebagai <i>Clearing House</i>	Tersedianya badan <i>Clearing House</i> lintas bidang dan lintas KL	Efisiensi dan Efektivitas pengadaan Alutsista TNI dan Alut POLRI	100%	100% K)	0,0
f.	Refocusing, intensifikasi dan kolaborasi R & D	Terwujudnya model dan/atau prototype alat peralatan pertahanan matra darat, laut, dan udara yang sesuai dengan kemajuan IPTEK dan mampu dikembangkan secara mandiri	Jumlah model dan /atau prototype alat peralatan pertahanan matra darat, laut, dan udara yang sesuai dengan kemajuan IPTEK dan mampu dikembangkan secara mandiri	30%	30%	0,0
g.	Produksi Alutsista Industri dalam negeri	Meningkatnya produksi Alutsista industri dalam negeri	Jumlah produksi Alutsista industri dalam negeri	20%	25%	7.100,0

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTAHANAN

NO	PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
I.	MABES TNI					
1.	Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya integratif	Terlaksananya fungsi dukungan manajemen dan tugas teknis dalam rangka pencapaian sasaran pembinaan kekuatan dan kemampuan menuju Minimum Essential Force (MEF).	a. Prosentase kualitas dan kuantitas penyelenggaraan administrasi dan perawatan personel. b. Prosentase kualitas dan kuantitas penyelenggaraan fungsi. c. Prosentase kualitas dan kuantitas penyelenggaraan pemelihara/perawatan perkantoran integratif. d. Prosentase kualitas dan kuantitas operasional perkantoran integratif. e. Prosentase kualitas dan kuantitas pengembangan sistem dan evaluasi kinerja integratif.	100% 70% 60% 70% 60%	100% 73% 62% 72% 62%	14.432,0
a.	Penyelenggaraan administrasi dan perawatan personel integratif	Melaksanakan pemenuhan hak-hak prajurit dan PNS TNI berupa pembayaran gaji, honorarium dan tunjangan serta lembur yang dapat diterima secara tepat waktu dan tepat jumlah sesuai dengan peraturan yang berlaku.	Prosentase pemenuhan hak-hak prajurit dan PNS TNI berupa pembayaran gaji, honorarium, dan tunjangan serta lembur yang dapat diterima secara tepat waktu dan tepat jumlah sesuai dengan peraturan yang berlaku.	100%	100%	3.599,7
2.	Program penggunaan kekuatan pertahanan integratif	Tercapainya tingkat kesiapan Alutsista, non Alutsista, organisasi, doktrin, fasilitas dan sarana prasarana serta kekuatan pendukung, tegaknya hukum dan terjaganya keamanan wilayah laut yurisdiksi nasional.	a. Prosentase kualitas dan kuantitas penyelenggaraan Operasi Militer untuk Perang (OMP). b. Prosentase kualitas dan kuantitas penyelenggaraan Operasi Militer Selain Perang (OMSP). c. Prosentase kualitas dan kuantitas penyelenggaraan operasi Gaktib Yustisi. d. Prosentase kualitas data intelijen dan pelaksanaan pengamanan. e. Prosentase kualitas dan kuantitas pemberdayaan potensi nasional menjadi kekuatan wilayah pertahanan.	50% 50% 45% 45%	52% 52% 47% 47%	8.328,7

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTAHANAN

NO	PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
a.	Operasi Militer untuk Perang (OMP).	Terlaksananya tugas OMP secara efektif	Jumlah dan cakupan wilayah penyelenggaraan OMP	90%	92%	6.132,0
b.	Operasi Militer Selain Perang (OMSP).	Terlaksananya tugas OMSP secara efektif	Jumlah dan cakupan wilayah penyelenggaraan OMSP	30%	32%	1.485,0
c.	Ops Gaktib dan Ops Yustisi.	Meningkatnya kondisi ketertiban di daerah rawan.	Prosentase kualitas dan kuantitas operasi Gaktib.	45%	47%	95,6
d.	Operasi intelijen Setrategis	Dapat ditangkalnya ATHG pertahanan negara.	Prosentase kualitas dan kuantitas data intelijen dan pengamanan yang dibutuhkan	45%	47%	267,6
e.	Operasi Pemberdayaan Wilayah Pertahanan	Terselenggaranya operasi wilayah pertahanan	Prosentase kualitas dan kuantitas pembinaan wilayah pertahanan nasional	45%	47%	54,7
3	Program Modernisasi Alutsista/ Non-Alutsista/Sarpras Integratif	Meningkatnya modernisasi dan peningkatan Alutsista dan fasilitas/Sarpras dalam rangka pencapaian sasaran pembinaan kekuatan serta kemampuan TNI menuju MEF	a. Peningkatan kemampuan dan penambahan jumlah Alutsista. b. Peningkatan kemampuan dan penambahan jumlah Non-Alutsista. c. Peningkatan kemampuan dan penambahan jumlah Amunisi. d. Peningkatan kemampuan dan penambahan jumlah Alat Khusus/ Fungsional. e. Peningkatan kemampuan dan penambahan jumlah Alkom/Matsus Komlek. f. Peningkatan kemampuan dan penambahan jumlah Fasilitas dan Sarpras.	10%	13%	9.159,0
				23%	26%	
				20%	23%	
				30%	33%	
				25%	28%	
				20%	23%	
a	Pengadaan MKK	Peningkatan kemampuan dan penambahan jumlah munisi.	Prosentase kecukupan Bekal Pokok MKK.	36%	38%	194,0
b.	Pengadaan Munisi Khusus	Peningkatan kemampuan dan penambahan jumlah munisi khusus	Prosentase kecukupan Munisi Khusus	36%	38%	356,3
c.	Pengadaan MKB	Peningkatan kemampuan dan penambahan jumlah MKB	Prosentase kecukupan Bekal Pokok MKB	63%	65%	679,8
d.	Pengadaan Alutsista Strategis Integratif	Percepatan peningkatan kemampuan Alutsista Integratif.	Prosentase pencapaian MEF Integratif	10%	14%	5.872,6

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTAHANAN

NO	PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
4	Program Profesionalisme Prajurit Integratif.	Terwujudnya profesionalisme dan satuan dalam rangka pencapaian sasaran pembinaan kekuatan dan kemampuan menuju MEF	a. Prosentase kualitas dan kuantitas latihan. b. Prosentase kualitas dan kuantitas hasil latihan bersama dengan negara sahabat. c. Prosentase kualitas dan kuantitas hasil kerja sama militer internasional. d. Prosentase kualitas dan kuantitas pendaftaran dan seleksi. e. Prosentase kualitas dan kuantitas pendidikan pertama. f. Prosentase kualitas dan kuantitas pendidikan pengembangan umum. g. Prosentase kualitas dan kuantitas pendidikan umum. h. Prosentase kualitas dan kuantitas pendidikan spesialisasi/profesi & latihan.	30% 30% 25% 30% 50% 40% 40% 45%	32% 32% 27% 32% 52% 42% 42% 47%	1.434,9
a	Latihan kesiapsiagaan Ops	Menguji kemampuan unsur-unsur TNI dan diarahkan untuk menyiapkan unsur TNI dalam rangka tugas OMP dan OMSP.	Prosentase kecukupan porsi dan jenis latihan kesiapsiagaan.	20%	22%	47,9
b.	Latihan Pembinaan Balakpus TNI	Memelihara serta meningkatkan kemampuan dan kesiapsiagaan satuan untuk mendukung tugas pokok satuan.	Prosentase kecukupan porsi dan jenis latihan Balakpus	20%	22%	37,2
c.	Latihan Pratugas Operasi	Meningkatkan dan menguji kemampuan unsur-unsur TNI yang akan melaksanakan tugas ke daerah rawan dan perbatasan dalam bentuk latihan Pratugas Operasi.	Prosentase kecukupan porsi dan jenis latihan pratugas	20%	22%	7,8
d.	Pembangunan Sarana Prasarana Profesionalisme Personel Integratif.	Tercukupinya fasilitas profesionalisme personel secara minimum.	Prosentase jumlah kecukupan fasilitas pendidikan kesehatan perumahan sarana prajurit.	15%	17%	265,8

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTAHANAN

NO	PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
C.	TNI AD					
1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Matra Darat	Terwujudnya kekuatan dan kemampuan TNI AD menuju Minimum Essetial Force (MEF)	a. % Peningkatan kinerja dan profesionalitas personel Matra Darat. b. % Peningkatan kemampuan operasional perkantoran. c. % Terwujudnya akuntabilitas dan optimalisasi kinerja serta laporan keuangan	60% 60% 45%	62% 62% 47%	80.269,5
2	Program Dukungan Kesiapan Matra Darat	Tercapainya tingkat kesiapan Alutsista dan Fasilitas/Sarpras dalam rangka pencapaian sasaran pembinaan kekuatan dan kemampuan TNI AD menuju MEF	% Kesiapan kekuatan dan kemampuan Matra Darat	30%	32%	15.035,6
a.	Penyelenggaraan Intelijen dan Pengamanan Matra Darat	Kesiapan kekuatan dan kemampuan matra darat	% Kecukupan Operasi Pengamanan Personel, Material dan Dokumen serta Efektifitas dan Efisiensi Deteksi Dini	40%	45%	731,9
3	Program Modernisasi Alutsista dan Non Alutsista/Sarana dan Prasarana Matra Darat	Terlaksananya modernisasi dan peningkatan Alutsista dan Fasilitas/ Sarpras dalam rangka pencapaian sasaran pembinaan kekuatan serta kemampuan TNI Angkatan Darat menuju MEF	% Peningkatan / penambahan alutsista, non alutsista, fasilitas serta sarpras Matra Darat terhadap MEF	20%	22%	19.956,7
a.	Pengadaan / Penggantian Kendaraan Tempur	Terlaksananya modernisasi dan peningkatan Alutsista Ranpur dalam rangka pencapaian sasaran pembinaan kekuatan serta kemampuan TNI Angkatan Darat menuju MEF	% Prosentase peningkatan dan penambahan Ranpur terhadap MEF.	20%	25%	491,1
b.	Pengadaan / Penggantian Pesawat Terbang (Sabang)	Terlaksananya modernisasi dan peningkatan Alutsista Pesud/Rotary Wing dalam rangka pencapaian sasaran pembinaan kekuatan serta kemampuan TNI Angkatan Darat menuju MEF	% Prosentase peningkatan dan penambahan Sabang terhadap MEF.	20%	25%	217,2
c.	Pengadaan / Penggantian Senjata dan Munisi	Terlaksananya modernisasi dan peningkatan Senjata Berat dan Senjata Ringan dalam rangka pencapaian sasaran pembinaan kekuatan serta kemampuan TNI Angkatan Darat menuju MEF	% Prosentase peningkatan dan penambahan Senjata dan munisi terhadap MEF.	20%	25%	567,6
d.	Pengadaan Alutsista Strategis Matra Darat	Percepatan Modernisasi Alutsista melalui PLN	% Pencapaian MEF matra Darat	15%	23%	16.357,0

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTAHANAN

NO	PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
4	Program Peningkatan Profesionalisme Personel Matra Darat	Terwujudnya profesionalisme personel dan satuan dalam rangka pencapaian sasaran pembinaan kekuatan dan kemampuan TNI AD menuju MEF	% Pemenuhan kebutuhan personel sesuai TOP/DSP/DSP.	30%	35%	3.246,9
a.	Latihan Matra Darat	Terwujudnya profesionalisme personel dan satuan dalam rangka pencapaian sasaran pembinaan kekuatan dan kemampuan TNI AD menuju MEF	% Ketepatan Frekuensi Latihan perorangan dan satuan secara rutin dan terjadwal.	25%	30%	681,9
b.	Pembangunan Sarana-Prasarana Profesionalisme Personel Matra Darat	Tercukupinya fasilitas profesionalisme personel secara minimum	% jumlah kecukupan fasilitas pendidikan-kesehatan-perumahan-asrama prajurit	10%	15%	389,6
C.	TNI AL			41%	49%	
1.	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Matra Laut	Meningkatnya kedisiplinan dan profesionalitas Personel TNI AL, kelancaran penyelenggaraan operasional perkantoran, serta akuntabilitas dan optimalisasi kinerja	Persentase pemenuhan dan peningkatan dukungan umum dan pelaksanaan tugas teknis lainnya, meliputi : Administrasi perawatan personel. Pelayanan kesehatan. Fungsi Kepolisian Militer. Pembinaan dan dukungan hukum. Administrasi Personel. Fasilitas dan sarana prasarana Pangkal-an. Administrasi perbekalan dan dukungan bekal. Penerangan Pasukan dan Penerangan Umum. Administrasi Umum. Pengelolaan Keuangan serta Adminis-trasi Perencanaan dan Penganggaran. Pengawasan dan Pemeriksaan.	44%	54%	23.423,2
2.	Dukungan Kesiapan Matra Laut	Kemampuan dan kekuatan TNI AL meningkat dan siap operasional mendukung pelaksanaan tugas, serta meningkatnya daya tangkal dan daya gentar pertahanan negara di laut		32%	41%	8.793,8

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTAHANAN

NO	PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
a.	Penyelenggaraan Intelijen dan Pengamanan Matra Laut	Meningkatnya produk/data intelijen baik secara kualitas maupun kuantitas serta meningkatnya pengamanan sesuai standar	Persentase keakurasian dan kelengkapan deteksi dan analisis AGHT secara akuntabel dan tepat waktu.	65%	84%	94,9
b.	Penyelenggaraan Operasi Matra Laut dan Penegakan Hukum serta Penjagaan Keamanan di wilayah Laut Yuridiksi Nasional	Peningkatan penegakan hukum dan penjagaan keamanan di wilayah laut yuridiksi nasional serta kesiapsiagaan operasi TNI AL.	Persentase wilayah laut yuridiksi nasional yang bebas pelanggaran hukum dan gangguan keamanan serta kesiapsiagaan operasi TNI AL secara akuntabel dan tepat waktu.	48%	65%	200,8
c.	Penyelenggaraan Surta Hidros	Peningkatan penyelenggaraan Surta Hidros Matra Laut	Persentase kesiapan dan kelengkapan data dan informasi Hidro-oseanografi secara akuntabel dan tepat waktu.	40%	54%	26,5
3.	Modernisasi Alutsista dan non Alutsista serta Pengembangan Fasilitas dan Sarana Prasarana Pertahanan Negara Matra Laut	Kemampuan dan kekuatan TNI AL meningkat dan siap operasional mendukung pelaksanaan tugas, serta meningkatnya daya tangkal dan/atau daya gentar sistem pertahanan negara di laut	Persentase kesiapan dan penambahan material/bekal alutsista dan non alutsista serta fasilitas dan sarana prasarana pertahanan negara matra laut.	30%	38%	25.745,4
a.	Peningkatan / pengadaan Alpung, KRI, KAL, Ranpur dan Rantis	Peningkatan kemampuan dan penambahan jumlah Alpung, KRI, KAL, Ranpur dan Rantis	Persentase kesiapan dan penambahan Alpung, KRI, KAL, Ranpur dan Rantis secara akuntabel dan tepat waktu.	40%	45%	657,3
b.	Peningkatan / pengadaan Pesud dan sarana prasarana Penerbangan TNI AL.	Peningkatan kesiapan dan penambahan Pesud beserta sarana prasarana Penerbangan TNI AL.	Persentase kesiapan dan penambahan Pesawat Udara TNI AL beserta sarana prasarana Penerbangan TNI AL dalam mendukung tugas operasi secara akuntabel dan tepat waktu.	40%	45%	159,7
c.	Pengadaan Alutsista Strategis Matra Laut	Percepatan pengadaan Alut-sista Strategis Matra Laut	Persentase penambahan material Alutsista strategis TNI AL secara akuntabel dan tepat waktu.	14%	22%	20.315,9
4.	Peningkatan Profesionalisme Personel Matra Laut	Kinerja organisasi semakin meningkat dan diawasi oleh personel yang berkualitas, profesional sesuai SKP dan dengan jumlah yang mencukupi sesuai DSP	Persentase kesiapan personel dan satuan TNI AL dalam melaksanakan tugas.	58%	62%	2.116,4
a.	Penyelenggaraan Latihan Operasi Matra Laut	Peningkatan kemampuan personel dan satuan TNI AL dalam melaksanakan tugas operasi TNI AL.	Persentase kesiapan dan keberhasilan operasi TNI AL secara mandiri, gabungan dan bersama secara akuntabel dan tepat waktu.	70%	75%	345,5
b.	Pembangunan Fasilitas dan sarana prasarana profesionalisme Matra Laut	Tercukupinya Fasilitas dan sarana prasarana profesionalisme Matra Laut.	Persentase kesiapan fasilitas dan sarana prasarana profesionalisme matra laut secara akuntabel dan tepat waktu.	40%	45%	318,9

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTAHANAN

NO	PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
D.	TNI AU					
1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Matra Udara	Meningkatnya kedisiplinan dan profesionalisme, kelancaran operasional perkantoran, akuntabilitas, dan optimalisasi kinerja/laporan	a. Meningkatnya kedisiplinan dan sikap profesionalitas personel matra udara b. Kelancaran penyelenggaraan operasional perkantoran. c. Akuntabilitas dan optimalisasi kinerja serta laporan keuangan	55%	57%	11.982,1
2	Dukungan Kesiapan Matra Udara	Tercapainya tingkat kesiapan alutsista, non alutsista, organisasi, doktrin, fasilitas dan sarana presarana serta kekuatan pendukung matra udara	a. % tingkat kesiapan kekuatan dan kemampuan tni angkatan udara b. Menurunnya angka pelanggaran hukum dan gangguan keamanan di udara.	20%	22%	2.776,4
a.	Penyelenggaraan OMSP Matra Udara	Peningkatan penyelenggaraan operasi militer selain perang Matra Udara dan penegakan hukum serta penjagaan keamanan di wilayah yuridiksi nasional	Jumlah dan cakupan wilayah penyelenggaraan OMSP Matra Udara	30%	35%	5,6
b.	Penyelenggaraan Intelijen dan Pengamanan Matra Udara	Peningkatan penyelenggaraan intelijen dan pengamanan matra udara	% kualitas dan kuantitas data intelijen dan pengamanan yang dibutuhkan	35%	40%	21,8
c.	Penyelenggaraan Surta	Peningkatan penyelenggaraan Surta	% kualitas dan kuantitas produk Surta untuk kepentingan Militer	30%	35%	12,5
3	Modernisasi Alutsista dan non Alutsista serta Pengembangan Fasilitas dan Sarpras Matra Udara	Terlaksananya modernisasi dan peningkatan Alutsista dan Fasilitas/Sarpras dalam rangka pencapaian sasaran pembinaan kekuatan serta kemampuan TNI AU menuju MEF	Prosentase peningkatan/ penambahan alutsista, non alutsista, fasilitas serta sarpras matra udara	15%	17%	34.823,7
a.	Peningkatan/pengadaan Pesawat udara	Peningkatan kemampuan dan penambahan jumlah Pesawat udara	% Peningkatan kemampuan dan penambahan jumlah Pesawat udara terhadap MEF.	15%	46%	7.796,9
b.	Peningkatan/pengadaan Radar dan Alat Komlek Lainnya	Peningkatan kemampuan dan penambahan jumlah Radar dan Alat Komlek Lainnya	% Peningkatan kemampuan dan penambahan jumlah Radar dan Alat Komlek Lainnya terhadap MEF.	10%	40%	4.616,8
c.	Pengadaan Alutsista Strategis Matra Udara	Percepatan peningkatan alutsista strategis matra udara	% peningkatan total alutsista strateis matra udara terhadap MEF.	10%	32%	19.996,4

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTAHANAN

NO	PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
4	Peningkatan Profesionalisme Personel Matra Udara	Terpenuhinya profesionalisem personel matra udara sesuai DSP, peningkatan, dan kesiapan personel	% kualitas dan kuantitas latihan tingkat L.U.M.P-1 s.d. L.U.M.P-4 Matra Udara	30%	32%	1.052,7
a.	Latihan Matra Udara	Terlaksananya kegiatan latihan operasi Matra Udara	% kualitas dan kuantitas latihan tingkat L.U.M.P-1 s.d. L.U.M.P-4 Matra Udara	30%	35%	232,2
b.	Pembangunan Sarana-Prasarana Kesejahteraan Personel Matra Udara	Tercukupinya fasilitas kesejahteraan personel secara minimum	% jumlah kecukupan fasilitas perumahan-asrama prajurit	20%	25%	261,3
TOTAL ALOKASI KEMENTERIAN PERTAHANAN 2010-2014						279.862,5

K : Angka kumulatif 5 tahun (2010-2014)

**RENCANA TINDAK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH 2010-2014
PER KEMENTERIAN/LEMBAGA**

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM

NO	PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
1.	Program Peningkatan Pelayanan dan Pengawasan Keimigrasian.	Seluruh pengawasan dan penindakan dilakukan secara konsisten untuk menjamin kepastian hukum.	Persentase hasil pengawasan yang ditindaklanjuti			2.081,0
		Seluruh unit kerja memenuhi standar pelayanan prima dan mencapai target kinerjanya dengan administrasi yang akuntabel.	Persentase target kinerja yang terpenuhi			
1.1.	Kegiatan pelayanan dokumen perjalanan visa dan fasilitas keimigrasian.	Peningkatan pelayanan dokumen perjalanan, visa dan fasilitas keimigrasian.	Persentase Penerbitan persetujuan visa yang memenuhi standar dengan data akurat. Persentase Kebijakan pemberian paspor RI yang memenuhi standar dengan data akurat. Persentase Pemberian paspor TKI Timur Tengah yang memiliki standar. Jumlah dan jenis fasilitas keimigrasian yang diberikan memenuhi standar. Persentase Kebijakan pemberian izin keimigrasian yang memenuhi standar dengan data akurat.	80%	85%	35,0

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM

NO	PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
1.2.	Persetujuan izin tinggal dan status keimigrasian.	Peningkatan pelayanan pemberian izin tinggal dan status keimigrasian dengan waktu yang lebih singkat dan berbiaya rendah.	Persentase persetujuan izin tinggal yang diterbitkan.	85%	90%	2,9
			Persentase Persetujuan alih status yang diterbitkan sesuai standar.			
			Jumlah persetujuan Surat Keterangan Keimigrasian (SKIM) dan penelaahan status kewarganegaraan yang diterbitkan sesuai standar.			
2	Program Administrasi Hukum Umum.	Seluruh unit kerja memenuhi standar pelayanan prima dan mencapai target kinerjanya dengan administrasi yang akuntabel.	Persentase target kinerja yang terpenuhi	80%	95%	381,6
2.1	Kegiatan administrasi badan hukum.	Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan jasa badan hukum PT dan badan hukum sosial yang sesuai standar dan akuntabel serta berbasis IT dengan waktu yang lebih singkat dan berbiaya rendah.	Persentase adm pelayanan jasa hukum Perseroan Tertutup yang sesuai standar dan akuntabel.	80%	95%	127,0
			Persentase adm pelayanan jasa hukum PT, Lembaga Keuangan dan fasilitas penanaman modal yang sesuai standar dan akuntabel.	80%	95%	
			Persentase adm pelayanan jasa hukum badan hukum sosial yang sesuai standar dan akuntabel.	80%	94%	
			Persentase pengumuman dlm (tambahan Berita Negara (TBN) secara tepat waktu dan persentase layanan permohonan badan hukum berbasis IT dengan data yang lengkap dan akurat.	80%	95%	

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM

NO	PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
			Persentase penyelesaian gugatan masy dan pemberian pendapat hukum secara akuntabel.	69%	83%	
3	Program Pembinaan/ Penyelenggaraan HKI.	Terselenggaranya pembinaan dan penyelenggaraan HKI	Persentase target kinerja yang terpenuhi			400,9
3.1	Penyelenggaraan Sistem Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Rahasia Dagang.	Peningkatan kualitas system Hak Cipta, Desain Industri, Desain tata letak Sirkuit Terpadu, dan Rahasia Dagang yang memperoleh perlindungan hukum dengan waktu yang lebih singkat dan biaya rendah.	<p>Presentasi pendaftaran hak cipta Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Rahasia Dagang.</p> <p>Persentase administrasi kelengkapan dokumen permohonan, mutasi dan lisensi Hak Cipta, Hak Tata Letak Sirkuit Terpadu, Desain Industri dan Rahasia Dagang yang sesuai standar.</p> <p>Persentase administrasi klasifikasi dan penyelesaian pemeriksaan substantif Desain Industri yang sesuai standar.</p> <p>Persentase pengumuman desain industri dan penerbitan surat pendaftaran ciptaan, sertifikat Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu serta sertifikat dan perpanjangan Desain Industri yang sesuai standar.</p> <p>Persentase pelayanan hukum di bidang Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang yang sesuai standar.</p>	20%	100%	8,6
3.2	Penyelenggaraan Sistem Paten.	Peningkatan kualitas system paten yang memperoleh perlindungan hukum dengan waktu yang lebih singkat dan biaya rendah.	<p>Persentase administrasi pemeriksaan substantif sesuai standar.</p> <p>Persentase administrasi penerbitan sertifikat Paten dan pemeliharaan sesuai standar</p>	20%	100%	14,0

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM

NO	PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
			Persentase pelayanan hukum di bidang Paten sesuai standar.	20%	100%	
3.3	Penyelenggaraan Sistem Merek dan Indikasi Geografis.	Peningkatan kualitas system Merek dan Indikasi Geografis dengan waktu yang lebih singkat dan biaya rendah.	Presentasi pendaftaran Hak Merek dan Indikasi Geografis.	20%	100%	17,4
			Persentase administrasi kelengkapan dokumen permohonan Merek dan Indikasi Geografis, perpanjangan, mutasi dan lisensi serta pengklasifikasian Merek sesuai standar.			
			Persentase administrasi pemeriksaan substantif Merek.			
			Persentase administrasi pemeriksaan substantif Indikasi Geografis sesuai standar.			
			Persentase penerbitan sertifikat merek dan Indikasi Geografis serta perpanjangan Merek sesuai standar.			
			Persentase pelayanan hukum di bidang Merek.			
3.4	Penyelenggaraan Sistem Teknologi Informasi HKI	Peningkatan jumlah layanan HKI yang bisa diakses masyarakat secara on line dengan sistem aplikasi dan basis data yang akurat.	Persentase unit kerja HKI yang terintegrasi dalam aplikasi sistem informasi HKI yang terjamin keamanannya.	20%	100%	57,7
			Persentase unit kerja HKI dan kantor wilayah yang terintegrasi melalui sistem jaringan terintegrasi Kemenkumham.	20%	100%	
			Persentase informasi HKI yang dapat diakses masyarakat secara on line 24 jam dengan data yang <i>up to date</i> .	20%	100%	
			Persentase kelengkapan dokumentasi HKI secara manual dan digital.	20%	100%	

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM

NO	PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
4	Program Pembentukan Hukum.	Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan perkembangan global secara tepat waktu.				236,0
4.1	Kegiatan Perancangan Peraturan Perundang-undangan.	Peningkatan kualitas RUU dan perat perundang-undangan di bawah UU di DPR serta tenaga fungsional Perancang PerUUan.	<p>Persentase rancangan peraturan perundang-undangan dibawah UU yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan perkembangan.</p> <p>Persentase penyelesaian pembahasan rancangan undang-undang di DPR secara tepat waktu.</p> <p>Persentase tenaga fungsional perancang peraturan perundang-undangan yang mendapatkan kualifikasi dan promosi sesuai standar secara tepat waktu dengan administrasi yang akuntabel.</p> <p>Persentase kelengkapan dokumentasi dan pustaka bidang peraturan perundang-undangan secara akurat dan <i>up to date</i>.</p> <p>Persentase Pembenahan Peraturan Perundang-undangan di bidang Pertanahan, tata ruang, dan Lingkungan Hidup.</p> <p>Persentase Peraturan perundang-undangan di bidang mekanisme Perlindungan Saksi dan Pelapor.</p> <p>Persentase Peraturan Perundang-undangan yang mendorong pemberantasan korupsi.</p>	<p>20%</p> <p>20%</p> <p>20%</p> <p>20%</p> <p>20%</p> <p>20%</p>	<p>100%</p> <p>100%</p> <p>100%</p> <p>100%</p> <p>100%</p> <p>100%</p>	75,0

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM

NO	PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
4.2	Kegiatan Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan.	Meningkatkan keharmonisan rancangan peraturan perundang-undangan tingkat pusat bidang politik, hukum, keamanan, keuangan, perbankan, industri, perdagangan, sumber daya alam, riset, teknologi, kesejahteraan rakyat yang harmonis.	Persentase rancangan peraturan perundang-undangan tingkat pusat bidang politik, hukum dan keamanan yang harmonis. Persentase rancangan peraturan perundang-undangan tingkat pusat bidang keuangan dan perbankan yang harmonis. Persentase rancangan peraturan perundang-undangan tingkat pusat bidang industri dan perdagangan yang harmonis. Persentase rancangan peraturan perundang-undangan tingkat pusat bidang kesejahteraan rakyat yang harmonis. Persentase Pembenahan Peraturan Perundang-undangan di bidang Pertanahan, tata ruang, dan Lingkungan Hidup. Persentase Peraturan Perundang-undangan di bidang mekanisme Perlindungan Saksi dan Pelapor. Persentase Peraturan Perundang-undangan di bidang yang mendorong pemberantasan korupsi.	20%	100%	38,5

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM

NO	PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
4.3	Kegiatan fasilitasi perancangan peraturan daerah.	Meningkatkan pemerintahan daerah (provinsi, kab/kota) yang di petakan dan dipublikasikan peraturan daerahnya dalam sistem informasi peraturan daerah yang akurat dan <i>up to date</i> .	Persentase pemerintahan daerah (provinsi,kab/kota) yang dipetakan dan dipublikasikan peraturan daerahnya dalam sistem informasi peraturan daerah yang akurat dan <i>up to date</i> . Persentase pemerintahan daerah di wilayah I yang memperoleh fasilitasi perancangan peraturan daerah. Persentase pemerintahan daerah di wilayah II yang memperoleh fasilitasi perancangan peraturan daerah. Persentase pemerintahan daerah di wilayah III yang memperoleh fasilitasi perancangan peraturan daerah.	20%	100%	9,0
5	Program Pembinaan Hukum Nasional.	Tersusunnya hasil pengkajian; penelitian dan naskah akademik peraturan perundang-undangan dalam rangka mendukung efektifitas peraturan per-undang-undangan.	Persentase target kinerja yang terpenuhi			239,8
5.1	Kegiatan Penyelenggaraan Pelayanan Teknis, Perencanaan Pembangunan Hukum, Analisa dan Evaluasi dan Penyusunan Naskah Akademik Peraturan Perundang-undangan serta Kerjasama Bidang Hukum dalam rangka pembinaan dan pengembangan sistem hukum nasional.	Tersusunnya analisa, evaluasi, dan naskah akademik dalam rangka pembinaan dan pengembangan sistem hukum nasional.	Persentase Pemetaan kebutuhan hukum baik ditingkat nasional maupun daerah secara terintegrasi dan tepat waktu untuk jangka panjang, menengah dan tahunan. Tersusunnya Daftar RUU Prioritas Prolegnas Pemerintah sejumlah 247 dan 50 % inventarisasi Prolegda. Persentase penyusunan mekanisme Prolegnas dan Prolegda yang mendukung perencanaan pembangunan nasional.	50%	85%	30,0

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM

NO	PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
			Persentase kesesuaian RUU yang dibahas dengan prioritas dalam Prolegnas.			
5.2	Kegiatan Penyelenggaraan Pelayanan Teknis, Pengkajian dan Penelitian serta Pertemuan Ilmiah dalam rangka pengembangan Sistem Hukum Nasional.	Tersusunnya rekomendasi hasil penelitian di bidang substansi hukum kelembagaan hukum dan budaya hukum dalam rangka pengembangan system hukum nasional.	Tersusunnya rekomendasi hasil: - 60 kajian hukum. - 4 kajian konstitusi - 40 penelitian hukum. - 75 naskah akademik	100%	100%	40,9
5.3	Kegiatan Penyelenggaraan Pelayanan Teknis, Pengembangan Penyuluhan Hukum dan Pembudayaan Kesadaran Hukum Nasional.	Meningkatnya peran masyarakat dalam proses penyusunan peraturan perUUan.	Adanya forum komunikasi dan konsultasi penyusunan naskah akademik peraturan perundang-undangan. Persentase keterlibatan masyarakat dalam setiap tahapan proses pembentukan peraturan perundang-undangan dan pemahaman dalam pelaksanaannya.	100%	100%	41,7
6	Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemasyarakatan.	Terselenggaranya pembinaan dan penyelenggaraan Pemasyarakatan	Persentase target kinerja yang terpenuhi			207,2
6.1	Pembinaan Penyelenggaraan Kegiatan di bidang Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan barang Rampasan Negara.	Terkelolanya benda sitaan negara dan barang rampasan perkara	Persentase benda sitaan negara dan barang rampasan negara yang dikelola secara tepat waktu dan akuntabel.	70%	90%	2,0
6.2	Pembinaan Penyelenggaraan Kegiatan di bidang Keamanan dan Ketertiban.	Penyelenggaraan kegiatan di bidang keamanan dan kettertiban yang berkualitas serta pengelolaan benda sitaan Negara dan barang rampasan Negara.	Persentase Lapas Rutan yang memenuhi standar hunian dan keamanan. Persentase penanganan kasus penyebaran NAPZA kejahatan terorganisir dan pelanggaran kode etik petugas pemasyarakatan di UPT PAS.	10%	30%	5,8

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM

NO	PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
			Persentase pengaduan masyarakat maupun tahanna dan warga binaan pemasyarakatan yang ditidakanjuti secara cepat dan tepat.			
6.3	Pembinaan Penyelenggaraan Kegiatan di bidang Kesehatan dan Perawatan warga binaan Pemasyarakatan.	Penyelenggaraan kegiatan di bidang kesehatan dan perawatan yang berkualitas.	Persentase tahanan narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang memperoleh perawatan dan pelayanan kesehatan sesuai standar kesehatan. Penurunan jumlah penyakit menular. Persentase bayi, ibu hamil, ibu menyusui dan kelompok resiko tinggi yang memperoleh perlindungan secara tepat waktu dan akuntabel.	30%	50%	9,8
6.4	Pembinaan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pelayanan Tahanan dan Pembinaan Narapidana.	Terlaksananya pembinaan terhadap tahanan dan narapidana yang tepat dan akuntabel.	Persentase tahanan dan narapidana yang teregistrasi dan terklasifikasi secara tepat dan akuntabel. Persentase narapidana yang terserap di kegiatan kerja secara tepat dan akuntabel. Persentase narapidana yang memperoleh pembinaan kepribadian secara tepat dan akuntabel.	62% 60% 60%	82% 80% 90%	3,4
6.5	Pembinaan Penyelenggaraan kegiatan di bidang Bimbingan Kemasyarakatan dan Anak.	Penyeleggaran kegiatan Bimbingan Kemasyarakatan dan Anak yang berkualitas.	Persentase anak didik pemasyarakatan yang memperoleh pendidikan dan reintegrasi secara tepat waktu dan akuntabel. Persentase anak didik pemasyarakatan yang memperoleh pendampingan dan pembimbingan secara tepat dan akuntabel.	62%	82%	7,1

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM

NO	PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
			Persentase klien masyarakat yang memperoleh bimbingan dan pengawasan secara tepat dan akuntabel. Persentase anak didik masyarakat dan klien masyarakat yang mendapatkan litmas secara tepat dan akuntabel.			
7	Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kementerian Hukum dan HAM.	Seluruh aparatur Hukum dan HAM memiliki kompetensi yang sesuai dengan bidangnya dan memperoleh pengembangan karir yang jelas.	Persentase target kinerja yang terpenuhi			412,5
7.1	Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan dan Manajemen.	Peningkatan kualitas SDM hukum dan HAM	Peningkatan kinerja lulusan diklat kepemimpinan dan manajemen pada unit kerja.	92%	97%	38,0
7.2	Kegiatan penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis.	Peningkatan kualitas SDM hukum dan HAM	Persentase peningkatan kinerja lulusan diklat di bidang teknis pada unit kerjanya.	92%	97%	37,0
7.3	Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Fungsional HAM.	Peningkatan kualitas SDM hukum dan HAM	Persentase peningkatan kinerja lulusan diklat di bidang fungsional dan HAM pada unit kerjanya.	92%	97%	40,6
7.4	Kegiatan Pendidikan Kedinasan.	Peningkatan kualitas SDM hukum dan HAM Peningkatan kualitas SDM hukum dan HAM	Persentase lulusan yang menguasai ilmu dan keahlian teknis masyarakat. Persentase lulusan yang menguasai ilmu dan keahlian teknis keimigrasian.	92% 92%	97% 97%	50,2
8	Program Perlindungan dan Pemenuhan HAM.	Penyusunan Peraturan Perundang-undangan yang berperspektif HAM dan Penyusunan kebijakan terkait pemajuan, dan pemenuhan Hak Asasi Manusia.	Persentase peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang berperspektif HAM			150,9
8.1	Kegiatan Kerjasama HAM.	Peningkatan kerjasama dalam dan luar negeri dlm rangka pemajuan HAM dan harmonisasi rancangan peraturan perundang-undangan	Persentase harmonisasi rancangan peraturan perundang-undangan dalam perspektif HAM	100%	100%	9,0

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM

NO	PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
		dalam perspektif HAM serta Naskah Akademik instrumen HAM internasional.	Jumlah analisis laporan pelaksanaan instrumen HAM Internasional dan Naskah Akademik instrumen HAM Internasional.	6 Inst. HAM Internasional dan 2 N.A	6 Inst. HAM Internasional dan 2 N.A	
			Jumlah kerjasama luar negeri dalam rangka pemajuan HAM	10 Negara/ NGO;	10 Negara/ NGO;	
			Jumlah kerjasama dalam negeri dalam rangka implementasi HAM/RAN HAM.	440 pusat dan daerah	440 pusat dan daerah	
8.2	Kegiatan Penguatan HAM.	Presentasi KL pemerintah propinsi dan kabupaten/ kotamadya telah mengikuti pelatihan HAM.	Tersusunnya pedoman dan standarisasi kebijakan di semua bidang pembangunan yang berperspektif HAM.	10	50 ^{KJ}	10,0
			Persentase Kementerian/ Lembaga yang telah melaksanakan kebijakan yang berperspektif HAM.	10%	10%	
			Jumlah program pembelajaran HAM.	40	200 ^{KJ}	
			Jumlah bahan ajar HAM.	10	50 ^{KJ}	
			Jumlah fasilitator pelatihan HAM.			
8.3	Kegiatan Diseminasi HAM.	Meningkatnya Kementerian/Lembaga, Pemerintah Propinsi dan Kabupaten/Kota yang telah memperoleh diseminasi HAM.	Jumlah K/L atau daerah yang telah melaksanakan RAN HAM.	34 kab/kota	34 kab/kota	8,0
			Jumlah penyuluh HAM.	136 penyuluh	680 ^{KJ}	
			Jumlah evaluasi dan pengembangan diseminasi HAM.	34 kab/kota	34 kab/kota	
8.4	Kegiatan Informasi HAM.	Informasi yang dapat diakses dari K/L, Provinsi dan Kabupaten/Kota tentang HAM.	Jumlah data HAM yang diolah dari KL Propinsi dan Kabupaten/Kota.	156	850 ^{KJ}	7,0
			Jumlah evaluasi dan laporan tentang HAM.	156	850 ^{KJ}	
			Jumlah akses jalur informasi HAM melalui penyediaan koneksi internet.	156	850 ^{KJ}	

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM

NO	PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
			Jumlah layanan informasi melalui media cetak dan elektronik.	156	850 ^{K)}	
9	Program Peningkatan Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kemenkumham.	Seluruh perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan dilakukan secara tepat waktu dan terintegrasi serta berdasarkan data yang akurat. Seluruh unit kerja memenuhi standar pelayanan prima dan mencapai target kerjanya dengan administrasi yang akuntabel.	Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah I, Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah II, Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah III, Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah IV, Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah V dan Pengawasan Kinerja Inspektorat Khusus, Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya.	84%	92%	145,5
9.1	Kegiatan pengawasan Inspektorat khusus.	Terlaksananya mekanisme peggaduan masyarakat yang responsif terhadap kinerja aparat Kemenkumham	Persentase pengaduan dan kasus yang dituntaskan secara tepat waktu.	20%	100%	19,0
10	Program Penelitian dan Pengembangan HAM Kemenkumham	Seluruh perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan dilakukan secara tepat waktu dan terintegrasi serta berdasarkan data yang akurat.	Persentase target kinerja yang terpenuhi			118,4
11	Program Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya Kemenkumham.	Seluruh perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan dilakukan secara tepat waktu dan terintegrasi serta berdasarkan data yang akurat. Seluruh unit kerja memiliki sumberdaya manusia profesional sesuai kebutuhan dan kaderisasi yang berkesinambungan.	Persentase target kinerja yang terpenuhi			17.847,2

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM

NO	PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
11.1	Kegiatan Pengelolaan dan Pembinaan Kepegawaian Kemenkumham.	Peningkatan kualitas SDM Kemenkumham	Persentase unit kerja yang memiliki kaderisasi berkesinambungan dan pegawai yang memperoleh pengembangan karir.	100% dari formasi Penyesuaian ijazah S1,S2;	100%	108.2
				100% dari formasi pim tk III dan IV.	100%	
				100% dari formasi ujian dinas TK I dan II.	100%	
				100% dari formasi yang mengikuti pendidikan dasar keimigrasian dan teknis keimigrasian.	100%	
				100% data daftar kebutuhan pegawai untuk penyusunan formasi.	100%	
				80% Pengadaan CPNS pusat dan kanwil.	100%	
			Seluruh Unit Kerja memiliki SDM profesional sesuai kebutuhan dan kaderisasi yang berkesinambungan.	100% dari jumlah formasi yang mengikuti <i>fit and proper test</i> dalam rangka usulan promosi jabatan.	100%	
12	Program Sarana dan Prasarana Kemenkumham.	Terpenuhi sarana dan prasarana yang menunjang tupoksi Kemenkumham.	Prosentase kebutuhan sarana dan prasarana dari unit kerja yang terpenuhi secara tepat waktu dan akuntabel sesuai anggaran.			3.892,0
TOTAL ALOKASI KEMENKUMHAM 2010-2014						26.113,0

K : Angka kumulatif 5 tahun (2010-2014)

**RENCANA TINDAK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH 2010-2014
PER KEMENTERIAN/LEMBAGA**

KEMENTERIAN/LEMBAGA: KEMENTERIAN KEUANGAN

No	PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
I.	Pengelolaan Anggaran Negara	Terlaksananya fungsi penganggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah	Terwujudnya pengelolaan anggaran negara yang tepat waktu, transparan, dan akuntabel	100%	100%	498,0
a.	- Penyusunan dan penyampaian laporan keuangan Belanja Subsidi dan Belanja Lain-lain (BSBL) (Prioritas Nasional)	Tersusunnya Laporan Keuangan BSBL yang transparan dan akuntabel	Laporan Keuangan Belanja Subsidi dan Lain-lain (BSBL) yang lengkap dan tepat waktu	100%	100%	17,6
b.	- Pengelolaan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat (ABPP) (Prioritas	Terlaksananya kebijakan penganggaran yang transparan dan akuntabel	1. Pengalokasian belanja pemerintah pusat yang tepat waktu dan efisien 2. Penyediaan anggaran secara tepat waktu dan tepat jumlah untuk menunjang program di bidang pangan, pertanian, dan industri perdesaan sesuai dengan persetujuan 3. PMK No. 261/2008 tentang tatacara penyediaan anggaran, perhitungan, pembayaran, dan pertanggungjawaban subsidi pupuk 4. Dokumen RAPBN-P 2010 tentang perubahan sistem pengelolaan pendanaan BLU Tanah dan <i>Land Capping</i> untuk ditampung dalam APBN-P 2010 5. Peraturan pelaksanaan anggaran R&D berdasarkan program prioritas K/L yang bersangkutan sesuai dengan alokasi anggaran dalam APBN	100%	100%	35,5
				100%	100%	
				-	100%	
				100%	-	
				100%	-	

KEMENTERIAN/LEMBAGA: KEMENTERIAN KEUANGAN

No	PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
c.	- Pengembangan Sistem Penganggaran (Prioritas Bidang)	Terlaksananya penerapan sistem penganggaran berorientasi kinerja dan penerapan MTEF	1. Tersedianya norma penganggaran berbasis kinerja dan penerapan MTEF yang kredibel dan tepat waktu	100%	100%	47,4
			2. Revisi Keppres 80/2003, usulan mengenai percepatan proses pengadaan barang dan jasa, termasuk dalam angka pinjaman luar negeri	100%	-	
d	- Penyusunan Rancangan APBN (Prioritas Bidang)	Tersusunnya APBN yang sehat, kredibel, dan berkelanjutan	1. Tersusunnya Draft NK, RAPBN, & RUU APBN (APBN-P) dengan besaran yang akurat dan tepat waktu	100%	100%	26,1
			2. Peraturan pelaksanaan anggaran R&D berdasarkan program prioritas K/L yang bersangkutan sesuai dengan alokasi anggaran dalam APBN	100%	-	
			3. Road Map rasionalisasi subsidi listrik	100%	-	
			4. Roap Map rasionalisasi subsidi BBM	100%	-	
			5. RPP tentang penghapusan PNBPN	-	100%	
e	- Pengelolaan PNBPN dan subsidi (Prioritas Bidang)	Mengoptimalkan keuangan negara di bidang PNBPN dengan tetap menjaga pelayanan kepada masyarakat	1. Tercapainya target penerimaan SDA Migas dan Laba BUMN dalam APBN atau APBN-P	95%	100%	38,8
			2. Tersusunnya target dan pagu penggunaan PNBPN untuk APBN dan atau APBN-P	100%	100%	

KEMENTERIAN/LEMBAGA: KEMENTERIAN KEUANGAN

No	PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
			3. Terlaksananya pembayaran subsidi energi yang tepat waktu dan jumlah	100%	100%	
			4. Road Map rasionalisasi subsidi listrik	100%		
			5. Road Map rasionalisasi subsidi BBM	100%	-	
			6. RPP tentang penghapusan PNPB	-	100%	
			7. Melaksanakan penyempurnaan kebijakan dan peraturan subsidi SOP verifikasi perhitungan subsidi BBM, listrik, dan Pupuk agar lebih cepat dan efisien	-	100%	
2.	Peningkatan Pengelolaan Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah	1. Peningkatan efektifitas dan efisiensi pengelolaan hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah	1. Persentase ketepatan jumlah penyaluran dana transfer ke daerah	100%	100%	603,0
		2. Terciptanya tata kelola yang tertib sesuai peraturan perundang-undangan, transparan, kredibel, akuntabel, dan profesional dalam pelaksanaan hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah	2. Ketepatan waktu penyelesaian dokumen pelaksanaan penyaluran dana transfer ke daerah	4 hari	3 hari	
			3. Indeks kepuasan Pemda terhadap norma, standar, dan pengelolaan belanja transfer daerah ke pihak eksternal	3	3	
			4. Realisasi janji pelayanan evaluasi Perda/Raperda PDRD ke pihak eksternal dalam bentuk rekomendasi Menteri Keuangan	15 hari	12 hari	
			5. Kajian revisi UU 33/2004 dan PP 54/2005	100%	-	
a.	- Perumusan kebijakan, bimbingan teknis, dan pengelolaan transfer ke Daerah (Prioritas Nasional)	1. Peningkatan Efektifitas dan Efisiensi Pengelolaan Dana Transfer 2. Terciptanya Tata Kelola yang Tertib Sesuai Peraturan Perundang-undangan, Transparan, adil, proporsional, Kredibel, Akuntabel, dan Profesional dalam Pelaksanaan Transfer ke Daerah	1. Persentase ketepatan jumlah penyaluran jumlah dana transfer ke daerah	100%	100%	86,4
			2. Ketepatan waktu penyelesaian dokumen pelaksanaan penyaluran dana transfer ke daerah	4 hari	3 hari	

KEMENTERIAN/LEMBAGA: KEMENTERIAN KEUANGAN

No	PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
b.	- Perumusan kebijakan bimbingan teknis, monitoring, dan evaluasi di bidang PDRD	1. Optimalisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	1. Persentase jumlah kebijakan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dapat diimplementasikan	80%	85%	68,7
		2. Mewujudkan Kebijakan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang mendukung Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah	2. Realisasi janji pelayanan evaluasi Perda/Raperda PDRD ke pihak eksternal dalam bentuk rekomendasi Menteri Keuangan	15 hari	12 hari	
			3. Evaluasi dan rekomendasi Perda dan Raperda PDRD bermasalah	75%	100%	
			4. Program transisi/pengalihan PBB menjadi Pajak Daerah	-	100%	
			5. Pengalihan BPHTB menjadi Pajak Daerah	-	100%	
			6. Penerapan Pajak Rokok menjadi Pajak Daerah	-	100%	
			7. RPP tentang sistem pemungutan pajak daerah	100%	-	
			8. RPKM pemberian sanksi terhadap daerah yang melanggar ketentuan PDRD	100%	-	
			9. Mengkaji penerapan PBBKB di daerah berkaitan dengan harga dan subsidi BBM	100%	-	
c.	- Perumusan kebijakan, bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi di bidang pembiayaan dan kapasitas daerah (Prioritas Bidang)	1. Peningkatan Efektifitas dan Efisiensi Pengelolaan Pinjaman Daerah, Hibah Daerah, Obligasi Daerah, dan Investasi Daerah	1. Persentase jumlah kebijakan Pembiayaan dan Kapasitas Daerah yang dapat diimplementasikan	100%	100%	153,4
		2. Peningkatan Efektifitas dan Efisiensi Penataan Daerah	2. Persentase jumlah konsep kebijakan pembiayaan dan kapasitas daerah sesuai dengan rencana	100%	100%	
		3. Peningkatan Kapasitas Aparat Pengelola Keuangan Daerah	3. Persentase kepatuhan dan penegakan ketentuan/peraturan dibidang hibah ke daerah	80%	85%	

KEMENTERIAN/LEMBAGA: KEMENTERIAN KEUANGAN

No	PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
d.	- Perumusan kebijakan, pemantauan dan evaluasi di bidang pendanaan daerah dan ekonomi daerah, penyusunan laporan keuangan transfer ke daerah, serta pengembangan sistem informasi keuangan daerah (Prioritas Bidang)	1. Efisiensi dan Efektifitas Pengelolaan Dana Desentralisasi, Dana Dekonsentrasi, dan Dana Tugas Pembantuan	1. Persentase jumlah kebijakan Evaluasi Pendanaan dan Informasi Keuangan Daerah sesuai rencana	100%	100%	84,0
		2. Terkendalinya Defisit Anggaran Daerah	2. Persentase penyelesaian laporan hasil evaluasi pendanaan desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan serta perekonomian daerah sesuai rencana	100%	100%	
		3. Terselenggaranya SIKD Nasional yang TRUST (Complete, Reliable, Up to date, Secure, and Accurate)	3. Persentase tersedianya layanan informasi yang lengkap dan terkini pada <i>website</i> dan Mofisda sesuai yang disampaikan oleh penyaji data	80%	90%	
3.	Pengelolaan Perbendaharaan Negara	Meningkatkan pengelolaan keuangan negara secara profesional, transparan, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan	1. Persentase ketepatan penarikan dana	50%	80%	6.833,7
			2. Jumlah penerimaan remunerasi atas penyimpanan, penempatan, dan investasi jangka pendek (Idle Cash KUN)	3 triliun	16,9 triliun ^{K)}	
			3. Persentase ketepatan penyediaan dana untuk membiayai pengeluaran negara	98%	98%	
			4. Persentase realisasi kontribusi RDI/RPD kepada APBN	100%	100%	
			5. Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat	WDP	WTP	
			6. Jumlah LK K/L dan LK BUN yang mendapat opini WTP/WDP dari BPK	78 K/L & PA BUN WTP:50 WDP:28	83K/L & PA BUN WTP:81	
a.	- Peningkatan Pengelolaan Kas Negara (Prioritas Bidang)	1. Optimalisasi <i>Idle Cash</i> Pemerintah	1. Jumlah penerimaan remunerasi atas penyimpanan, penempatan, dan investasi jangka pendek (<i>Idle Cash</i> KUN)	3 triliun	16,9 triliun ^{K)}	96,9
		2. Menutup <i>cost of fund</i> pemerintah dalam pembiayaan defisit APBN	2. Persentase ketepatan penyediaan dana untuk membiayai pengeluaran Negara	98%	98%	
		3. Mengukur kinerja pengelolaan kas terkait pelayanan dalam penyaluran dana APBN				

KEMENTERIAN/LEMBAGA: KEMENTERIAN KEUANGAN

No	PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
b	- Manajemen Investasi dan Penerusan Pinjaman (Prioritas Bidang)	Mengoptimalkan penerimaan APBN hasil penerusan pinjaman sehingga mampu mendukung pengelolaan keuangan negara yang berkelanjutan	Persentase realisasi kontribusi RDI/RPD kepada APBN	100%	100%	107,6
c	- Penyelenggaraan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran (Prioritas Bidang)	1. Menjamin akuntabilitas dan transparansi pertanggungjawaban keuangan negara	1. Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat	WDP	WTP	154,9
		2. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan negara	2. Jumlah LK K/L dan LK BUN yang mendapat opini WTP dan WDP dari BPK	78 K/L& PA BUN WTP:50 WDP:28	83K/L& PA BUN WTP:81	
			3. Pengelolaan Keuangan Kementerian memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK	WDP	WTP	
d.	- Pembinaan Pelaksanaan Anggaran dan Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (Prioritas Bidang)	Agar pelaksanaan kegiatan dan pencairan dana dapat dilaksanakan sesuai jadwal yang direncanakan	Persentase ketepatan penarikan dana	50%	80%	80,2
4.	Pengelolaan Kekayaan Negara, Penyelesaian Pengurusan Piutang Negara, dan Pelayanan Lelang	Terselenggaranya pengelolaan kekayaan negara, penyelesaian pengurusan Piutang Negara dan pelayanan Lelang yang profesional, tertib, tepat guna, dan optimal serta mampu membangun citra baik bagi stakeholder	1. Jumlah Penerimaan Negara dan penerimaan kembali yang berasal dari pembiayaan APBN			3.246,9
			- Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara	67,7 Miliar	413,33 Miliar ^{K)}	
			- Bea Lelang	44,04 Miliar	260,01 Miliar ^{K)}	
			- Penerimaan pembiayaan APBN	350 Miliar	1105 Miliar ^{K)}	
			2. Jumlah penyelesaian piutang Negara dan pelayanan lelang			
			- Piutang negara yang dapat diselesaikan	770 Miliar	7109,76 Miliar ^{K)}	
			- Pokok lelang	3, 15 Triliun	18,57 Triliun ^{K)}	
3. Persentase penyelesaian permohonan pengelolaan kekayaan negara, termasuk pemanfaatan asset idle	68%	87,80%				

KEMENTERIAN/LEMBAGA: KEMENTERIAN KEUANGAN

No	PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
			4. Persentase BMN yang disertifikasi	-	90%	
a	- Perumusan kebijakan, standarisasi, bimbingan teknis, evaluasi dan pengelolaan Barang Milik Negara (Prioritas Bidang)	Terselenggaranya pengelolaan Barang Milik Negara yang professional, tertib, optimal, serta akuntabel	1. Persentase formulasi / pembaruan peraturan perundangan di bidang pengelolaan BMN 2. Persentase penyelesaian permohonan pengelolaan kekayaan Negara, termasuk pemanfaatan aset <i>idle</i> . 3. Persentase BMN yang akan disertifikasi 4. Penyelesaian inventarisasi dan penilaian terhadap Barang Milik Negara serta koreksi neraca	80% 70% - -	100% 82,50% 90% 100%	57,0
b.	- Perumusan kebijakan, standarisasi, bimbingan teknis, evaluasi dan pengelolaan Barang Milik Negara dan Kekayaan Negara yang Dipisahkan (Prioritas Bidang)	Terselenggaranya pengelolaan barang milik negara dan kekayaan negara yang dipisahkan yang professional, tertib, optimal serta akuntabel	1. Persentase formulasi / pembaruan peraturan perundangan di bidang pengelolaan BMN 2. Persentase penyelesaian permohonan pengelolaan kekayaan Negara, termasuk pemanfaatan aset <i>idle</i> . 3. Persentase BMN yang akan disertifikasi 4. Persentase penyelesaian pengelolaan dan penatausahaan Kekayaan Negara Dipisahkan 5. Penyelesaian inventarisasi dan penilaian terhadap Barang Milik Negara serta koreksi neraca	55% 66% - 60% -	100% 93% 90% 100% 100%	39,4
c.	- Perumusan kebijakan, standarisasi, bimbingan teknis, evaluasi dan Pengelolaan Kekayaan Negara Lain-lain (Prioritas Bidang)	Terselenggaranya pengelolaan kekayaan negara lain-lain secara professional, efektif, efisien, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan sekaligus mampu mengoptimalkan penerimaan negara yang berasal dari kekayaan negara lain-lain	1. Jumlah formulasi / pembaharuan peraturan perundangan di bidang pengelolaan kekayaan negara lain-lain\ 2. Jumlah penyelesaian berkas kekayaan negara lain-lain 3. Jumlah penerimaan kembali (recovery) yang berasal dari pengeluaran pembiayaan APBN 4. Penyelesaian inventarisasi dan penilaian terhadap Barang Milik Negara serta koreksi neraca	6 1770 350 Miliar -	20 ^{K)} 3970 ^{K)} 1105 Miliar ^{K)} 100%	289,0

KEMENTERIAN/LEMBAGA: KEMENTERIAN KEUANGAN

No	PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)	
				2010	2014		
5.	Program Perumusan Kebijakan Fiskal	Terwujudnya kebijakan fiskal yang <i>sustainable</i> dengan beban risiko fiskal yang terukur dalam rangka stabilisasi dan mendorong pertumbuhan perekonomian	1. Tingkat akurasi kebijakan fiskal			569,9	
			- Rata-rata persentase deviasi asumsi makro	10%	5%		
			- Persentase deviasi target defisit APBN	10%	8%		
			- Persentase deviasi proyeksi pendapatan Negara	4,50%	4%		
			2. Persentase efektivitas kebijakan pendapatan Negara	75%	85%		
a.	- Perumusan Kebijakan APBN (Prioritas Bidang)	Tersedianya rekomendasi kebijakan APBN yang <i>sustainable</i> untuk mendukung pembangunan nasional	1. Persentase deviasi target defisit APBN	10%	8%	68,1	
			2. Persentase deviasi proyeksi penerimaan perpajakan	4,50%	4%		
			3. Penyempurnaan PMK no.261/2008 tentang tata cara penyediaan anggaran, perhitungan, pembayaran, dan		-		100%
			4. Penyempurnaan kebijakan subsidi BBM, listrik dan pupuk agar lebih cepat dan efisien	100%			-
			5. Kajian penerapan PBBKB di daerah berkaitan dengan harga dan subsidi BBM	100%			-
			6. Kajian tentang rasionalisasi subsidi listrik dan subsidi BBM	100%			-

KEMENTERIAN/LEMBAGA: KEMENTERIAN KEUANGAN

No	PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
b.	- Pengelolaan Risiko Fiskal dan Sektor Keuangan (Prioritas Bidang)	1. Terwujudnya pengelolaan risiko fiskal yang antisipatif dan responsif yang dapat mendukung 2. Tersedianya rekomendasi dan pernyataan risiko fiskal	1. Jumlah risiko fiskal teridentifikasi yang terukur 2. Perubahan sistem pengelolaan pendanaan BLU Tanah dan Land Capping untuk ditampung dalam APBN-P 2010	4 100%	21 ⁸⁾ -	66,6
c.	- Perumusan Kebijakan Ekonomi (Prioritas Bidang)	Terwujudnya kebijakan ekonomi makro yang antisipatif dan responsif yang dapat mendukung stabilisasi dan mendorong pertumbuhan perekonomian	Persentase rata-rata deviasi proyeksi asumsi makro	10%	5%	93,3
d.	- Perumusan Kebijakan Pajak, Kepabeanan, Cukai dan PNB (Prioritas Bidang)	Tersedianya rekomendasi dan rumusan kebijakan pendapatan negara yang mendukung terwujudnya kebijakan fiskal	1. Persentase efektifitas kebijakan pendapatan negara	75%	85%	68,0
6.	Peningkatan dan Pengamanan Penerimaan Pajak	Peningkatan penerimaan pajak negara yang optimal	1. Persentase realisasi penerimaan pajak terhadap target penerimaan pajak 2. Persentase realisasi waktu pelayanan terhadap janji waktu pelayanan (quick win)	100% 100%	100% 100%	20.817,9
a.	- Perumusan kebijakan di bidang PPN, PBB, BPHTB, KUP, PPSP, dan Bea Materai (Prioritas Nasional)	Peningkatan efektifitas pembuatan peraturan	1. Persentase penyelesaian usulan pembuatan / Revisi peraturan perundangan terhadap peraturan perundangan yang harus dibuat / direvisi 2. Tersedianya PMK-PMK ttg Pemberian Fasilitas Fiskal sesuai Peraturan Per-UU-an dan skema Pembiayaan Infrastruktur ke & di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)	100% -	100% 100%	12,1
b.	- Perumusan kebijakan di bidang PPh dan perjanjian kerjasama perpajakan internasional (Prioritas Nasional)	Peningkatan efektifitas pembuatan peraturan	1. Persentase penyelesaian usulan pembuatan / Revisi peraturan perundangan terhadap peraturan perundangan yang harus dibuat / direvisi 2. Tersedianya PMK-PMK ttg Pemberian Fasilitas Fiskal sesuai Peraturan Per-UU-an dan skema Pembiayaan Infrastruktur ke & di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)	100% -	100% 100%	13,3

KEMENTERIAN/LEMBAGA: KEMENTERIAN KEUANGAN

No	PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
			3. Peraturan pelaksanaan mengenai insentif potongan PPh 5% bagi perusahaan yang melakukan R&D	100%	-	
c.	- Peningkatan efektivitas pemeriksaan, optimalisasi pelaksanaan penagihan (Prioritas Bidang)	Pemeriksaan dan Penagihan yang optimal untuk peningkatan kepatuhan Wajib Pajak dan Peningkatan Penerimaan Pajak	Persentase jumlah Refund Discrepancy dan Penerimaan Pajak dari Pemeriksaan dan Penagihan terhadap Realisasi Penerimaan Pajak	4%	3%	17,1
d.	- Peningkatan kualitas pelayanan serta efektivitas penyuluhan dan kehumasan (Prioritas Bidang)	Tingkat Kepuasan yang Tinggi atas Pelayanan Perpajakan	Indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan dan penyuluhan	72	76	344,8
e.	- Perencanaan, pengembangan, dan evaluasi di bidang teknologi, komunikasi dan informasi (Prioritas Bidang)	Teknologi informasi dan komunikasi yang handal dan tepat guna	Persentase penyelesaian pembangunan dan pengembangan sistem informasi terhadap target	100%	100%	772,6
f.	- Pelaksanaan reformasi proses bisnis (Prioritas Bidang)	Proses Bisnis yang efektif dan efisien	1. Persentase penyelesaian SOP terhadap SOP yang harus dibuat 2. Persentase penyelesaian proses bisnis/ SOP terhadap proses bisnis/SOP yang harus disempurnakan	100%	100%	1.397,2
g.	- Pengelolaan data dan dokumen Perpajakan (Prioritas Bidang)	Kepuasan yang tinggi dari pengguna data dan dokumen perpajakan	Persentase penyelesaian pemindaian berkas SPT	71%	79%	146,2
7.	Pengawasan, Pelayanan, dan Penerimaan di Bidang Kepabeanan dan Cukai	1. Terciptanya administrator kepabeanan dan cukai yang dapat memberikan fasilitasi terbaik kepada industri, perdagangan, dan masyarakat serta optimalisasi penerimaan 2. Terwujudnya profesionalisme SDM kepabeanan dan cukai 3. Terwujudnya pelayanan yang efisien dan pengawasan yang efektif	1. Jumlah Penerimaan Bea dan Cukai 2. Persentase jumlah kasus tindak pidana di bidang kepabeanan dan cukai yang diserahkan ke Kejaksaan 3. Persentase penyelesaian rancangan PMK dan aturan pelaksanaan lainnya terkait sistem pelayanan kepabeanan yang menunjang Sistem Logistik Nasional (<i>Customs Advance Trade Systems</i>)	100%	100%	9.758,2

KEMENTERIAN/LEMBAGA: KEMENTERIAN KEUANGAN

No	PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
			4. Persentase kantor pabean di perbatasan dengan kondisi sarana dan prasarana yang memadai	10%	50%	
a.	- Perumusan Kebijakan dan Pengembangan Teknologi Informasi Kepabeanan dan Cukai (Prioritas Nasional)	1. Terciptanya administrator kepabeanan dan cukai yang dapat memberikan fasilitasi terbaik berbasis teknologi informasi kepada industri, perdagangan, dan masyarakat serta optimalisasi penerimaan 2. Terwujudnya tingkat pelayanan yang efisien kepada pemangku kepentingan berkaitan dengan layanan berbasis teknologi informasi	1. Persentase sistem aplikasi dan infrastruktur TI yang sesuai dengan proses bisnis DJBC 2. Persentase penyelesaian aplikasi sistem kepabeanan yang terintegrasi dengan portal NSW 3. PMK untuk pengembangan sistem elektronik terkait dengan perijinan investasi di bidang kepabeanan dan perpajakan 4. PMK tentang Authorized Economic Operator (AEO) dan dukungan terkait dengan Sistem Logistik Nasional 5. PMK tentang Kawasan Pelayanan Pabean Terpadu (KPPT) dalam rangka pengembangan sistem logistik 6. PMK-PMK tentang pemberian fasilitas fiskal sesuai peraturan perundang-undangan dan skema pembiayaan infrastruktur ke dan di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) 7. PMK untuk memadukan Kawasan Pelayanan Pabean Terpadu (KPPT) dengan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di 5 lokasi (di Jawa dan Sumatra)	100%	100%	675,4
				-	100%	
				-	100%	
				-	100%	
				-	100%	
				-	100%	

KEMENTERIAN/LEMBAGA: KEMENTERIAN KEUANGAN

No	PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
b.	- Perumusan Kebijakan dan Bimbingan Teknis Fasilitas Kepabeanan (Prioritas Nasional)	1. Terciptanya administrator di bidang fasilitas kepabeanan yang dapat memberikan dukungan industry, perdagangan dan masyarakat serta optimalisasi pendapatan	1. Persentase realisasi janji layanan publik terkait pemberian fasilitas pembebasan dan kerigranan bea masuk	70%	80%	133,0
		2. Terwujudnya pelayanan yang efisien dan pengawasan efektif	2. Persentase realisasi janji layanan public terkait pemberian fasilitas pertambangan	70%	80%	
			3. Persentase realisasi janji layanan public terkait pemberian tempat penimbunan berikat (TPB).	70%	80%	
			4. Persentase penyelesaian rancangan PMK dan aturan pelaksanaan lainnya terkait sistem pelayanan kepabeanan yang menunjang Sistem Logistik Nasional (<i>Customs Advance Trade Systems</i>)	-	100%	
			5. Persentase penyelesaian peraturan terkait sistem pelayanan kepabeanan dan cukai di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)	-	100%	
			6. PMK untuk pengembangan sistem elektronik terkait dengan perijinan investasi di bidang kepabeanan dan perpajakan	-	100%	
			7. PMK tentang Authorized Economic Operator (AEO) dan dukungan terkait dengan Sistem Logistik Nasional	-	100%	
			8. PMK-PMK tentang pemberian fasilitas fiskal sesuai peraturan perundang-undangan dan skema pembiayaan	-	100%	
			9. PMK untuk memadukan Kawasan Pelayanan Pabean Terpadu (KPPT) dengan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di 5	-	100%	
c.	- Pelaksanaan Pengawasan dan Penindakan atas Pelanggaran Peraturan Perundangan, Intelijen dan Penyidikan Tindak Pidana Kepabeanan dan Cukai (Prioritas Bidang)	1. Terciptanya administrator kepabeanan dan cukai yang dapat memberikan fasilitasi terbaik kepada	1. Persentase tindak pidana di bidang kepabeanan dan cukai yang diserahkan ke kejaksaan	40%	50%	596,8
		2. Terciptanya institusi kepabeanan dan cukai yang dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat	2. PMK tentang <i>Authorized Economic Operator</i> (AEO) dan dukungan terkait dengan Sistem Logistik Nasional	-	100%	

KEMENTERIAN/LEMBAGA: KEMENTERIAN KEUANGAN

No	PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
	Kepabeanan dan Cukai (Prioritas Bidang)	3. Terwujudnya profesionalisme SDM di bidang intelijen, penindakan dan penyidikan yang handal				
		4. Terwujudnya pengawasan efektif dan pelayanan yang efisien				
d.	- Perumusan Kebijakan dan Peningkatan Pengelolaan Penerimaan Bea dan Cukai (Prioritas Bidang)	1. Terciptanya administrasi penerimaan kepabeanan dan cukai yang tertib dan dapat memberikan fasilitasi terbaik kepada industri, perdagangan, dan masyarakat serta optimalisasi penerimaan	1. Jumlah penerimaan bea dan cukai	100%	100%	19,6
		2. Terwujudnya profesionalisme SDM di bidang penerimaan dan peraturan kepabeanan dan cukai	2. Persentase penyelesaian evaluasi dan rekomendasi, penyempurnaan perancangan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai	70%	80%	
		3. Tercapainya perumusan peraturan di bidang kepabeanan dan cukai	3. Persentase peraturan pelaksanaan di bidang kepabeanan dan cukai yang selaras (tidak bertentangan) dengan perundang-undangan	75%	90%	
		4. Terwujudnya pelayanan yang efisien dan pengawasan yang efektif	4. PMK tentang <i>Authorized Economic Operator</i> (AEO) dan dukungan terkait dengan Sistem Logistik Nasional	-	100%	
			5. PMK-PMK tentang pemberian fasilitas fiskal sesuai peraturan perundang-undangan dan skema pembiayaan infrastruktur ke dan di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)	-	100%	
e.	- Perumusan Kebijakan dan Bimbingan Teknis Bidang Kepabeanan (Prioritas Bidang)	1. Terwujudnya professional SDM di bidang Teknis Kepabeanan	1. Frekuensi pemutahiran Database harga I	12x	60x ^{k)}	6,6
		2. Terciptanya pelayanan yang pasti di bidang kepabeanan kepada seluruh pemangku kepentingan (<i>stakeholders</i>)	2. Presentase ketepatan waktu penyelesaian penetapan nilai pabean dan klasifikasi barang	75%	80%	
			3. Persentase rumusan peraturan yang menjadi keputusan di bidang teknis kepabeanan	75%	80%	

KEMENTERIAN/LEMBAGA: KEMENTERIAN KEUANGAN

No	PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
			4. PMK untuk pengembangan sistem elektronik terkait dengan perijinan investasi di bidang kepabeanaan dan perpajakan	-	100%	
			5. PMK tentang <i>Authorized Economic Operator</i> (AEO) dan dukungan terkait dengan Sistem Logistik Nasional	-	100%	
			6. PMK tentang Kawasan Pelayanan Kepabeanaan Terpadu (KPPT) dalam rangka pengembangan Sistem Logistik	-	100%	
			7. PMK-PMK tentang Pemberian Fasilitas Fiskal sesuai peraturan perundang-undangan dan skema pembiayaan infrastruktur ke dan di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)	-	100%	
			8. PMK dan Perdirjen mengenai prosedur penetapan nilai pabean termasuk prosedur pengaduan dan keberatan	100%	-	
			9. Penerapan secara konsisten dan pemberian penjelasan kepada pengguna jasa kepabeanaan mengenai SOP tentang penetapan nilai pabean	100%	-	
			10. sistem penanganan pengaduan masyarakat khusus mengenai penetapan nilai pabean	100%	-	
8.	Pengelolaan dan Pembiayaan Utang	Mengoptimalkan pengelolaan utang pemerintah, baik yang berasal dari Surat Berharga Negara maupun pinjaman dengan biaya dan tingkat risiko yang terkelola dengan baik untuk mendukung kesinambungan fiskal	1. Pemenuhan target pembiayaan melalui utang	100%	100%	360,9
			2. Pembayaran utang secara tepat waktu, jumlah, dan sasaran	100%	100%	
			3. Ketersediaan informasi dalam rangka transparansi pengelolaan utang	100%	100%	
			4. Terpenuhinya struktur portofolio utang sesuai dengan strategi yang ditetapkan	100%	100%	
a.	- Pengelolaan Pinjaman (Prioritas Bidang)	Terpenuhinya kebutuhan pembiayaan APBN yang aman melalui pengadaan pinjaman	1. Pemenuhan target pembiayaan melalui pinjaman program	100%	100%	47,9
			2. Penyelesaian perjanjian pinjaman dan hibah	100%	100%	

KEMENTERIAN/LEMBAGA: KEMENTERIAN KEUANGAN

No	PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
b.	- Pengelolaan Surat Utang Negara (Prioritas Bidang)	Terpenuhinya kebutuhan pembiayaan APBN yang aman bagi kesinambungan fiskal melalui pengelolaan Surat Utang Negara (SUN)	1. Pemenuhan target pembiayaan melalui SUN	100%	100%	44,1
			2. Terpenuhinya struktur portofolio SUN sesuai dengan strategi yang ditetapkan	100%	100%	
c.	- Pengelolaan Pembiayaan Syariah (Prioritas Bidang)	Terpenuhinya kebutuhan pembiayaan APBN yang aman bagi kesinambungan fiskal melalui Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)	1. Pemenuhan target pembiayaan melalui SBSN	100%	100%	34,0
			2. Terpenuhinya struktur portofolio SBSN sesuai dengan strategi yang ditetapkan	100%	100%	
d.	- Pengelolaan Strategi dan Portofolio Utang (Prioritas Bidang)	Penyediaan strategi pengelolaan utang yang mempertimbangkan aspek biaya dan risiko	1. Tersedianya dokumen Strategi pengelolaan utang	1	6 ^{K)}	17,7
			2. Pencapaian target <i>effective cost</i> yang kredibel	100%	100%	
e.	- Pelaksanaan Evaluasi, Akuntansi, dan Setelmen Utang (Prioritas Bidang)	Terwujudnya pelaksanaan penyelesaian transaksi, pencatatan, dan pelaporan utang pemerintah yang profesional, efektif, transparan, dan akuntabel	1. Pembayaran utang secara tepat waktu, jumlah, dan sasaran	100%	100%	30,0
			2. Ketersediaan informasi dalam rangka transparansi pengelolaan utang	100%	100%	
9.	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Departemen Keuangan	1. Terwujudnya tata kelola yang baik dan kualitas layanan dan dukungan yang tinggi pada semua Eselon I di Kementerian Keuangan	Tingkat kompetensi karyawan untuk jabatan tematik	82,5% (JPM 70%)	85% (JPM 75%)	33.806,4
		2. Tingkat kepercayaan stakeholders (internal dan eksternal) yang tinggi				

KEMENTERIAN/LEMBAGA: KEMENTERIAN KEUANGAN

No	PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
10.	Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Keuangan	Terwujudnya pengawasan yang memberi nilai tambah melalui peningkatan efektivitas proses manajemen risiko, pengendalian, dan tata kelola serta peningkatan akuntabilitas aparatur di lingkungan Kementerian Keuangan	1. Jumlah <i>Policy Recommendations</i>	14 buah	82 buah ^{K)}	462,7
			2. Indeks kualitas laporan keuangan kementerian keuangan (BA 15)	3	4	
11.	Pengembangan SDM Keuangan dan Kekayaan Negara yang profesional melalui pendidikan dan pelatihan	1. Meningkatkan pemahaman masyarakat dan pelaku ekonomi akan penyelenggaraan pengelolaan Keuangan Negara	1. Jumlah peserta edukasi publik tentang Keuangan Negara	9.595	49.967 ^{K)}	2.565,6
		2. Mengembangkan SDM yang berintegritas dan berkompentensi tinggi	2. Rasio jam pelatihan terhadap jam kerja	3%	3.5%	
12.	Pengaturan, Pembinaan dan Pengawasan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Non Bank	1. Terwujudnya Bapepam-LK sebagai lembaga yang memegang teguh prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, independensi, dan integritas	1. Persentase pertumbuhan nilai transaksi saham harian	2,50%	3%	814,6
		2. Terwujudnya industri Pasar Modal dan Jasa Keuangan Non Bank sebagai penggerak perekonomian nasional dan berdaya saing global	2. Persentase pertumbuhan dana yang dikelola oleh lembaga pembiayaan dan penjaminan	10%	10%	
			3. Persentase pertumbuhan dana yang dikelola oleh industri perasuransian	6%	10%	
			4. Persentase pertumbuhan dana yang dikelola oleh industri dana pensiun	5%	15%	
			5. Persentase pertumbuhan unit penyertaan Reksa Dana	36%	36%	
			6. Indeks Kepuasan Stakeholders Bappepam-LK	77	82	

KEMENTERIAN/LEMBAGA: KEMENTERIAN KEUANGAN

No	PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
a.	Perumusan Peraturan, Penetapan Sanksi dan Pemberian Bantuan Hukum	1. Terciptanya regulasi di bidang Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Non Bank yang mampu menjamin kepastian hukum, adil, dan transparan	1. Persentase jumlah regulasi di bidang pasar modal dan LKNB yang memenuhi asas peraturan perundang-undangan yang baik.	90%	90%	27,2
		2. Terwujudnya penegakan hukum di bidang Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Non Bank yang obyektif dan efektif	2. Persentase jumlah sanksi administrasi atas pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan Jasa Keuangan yang obyektif.	97%	97%	
		3. Terjaganya kredibilitas Bapepam dan LK dengan mengamankan seluruh kebijakan yang telah diambil melalui pelaksanaan Litigasi yang taktis dan efektif.	3. Persentase jumlah perkara/litigasi yang diselesaikan dengan baik.	50%	50%	
b.	Riset Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Non Bank serta Pengembangan Teknologi Informasi	1. Terwujudnya kebijakan berbasis riset dan sistem pengawasan yang berbasis teknologi informasi terhadap industri pasar modal dan jasa keuangan non bank	1. Persentase penyelesaian jumlah laporan hasil riset yang tepat dan akurat di bidang Pasar Modal dan Lembaga Keuangan sesuai rencana.	100%	100%	25,7
		2. Terwujudnya industri pasar modal dan jasa keuangan non bank yang kredibel sebagai penggerak perekonomian nasional dan berdaya saing global	2. Persentase jumlah sistem yang terimplementasi sesuai dengan rencana.	60%	80%	
c.	Pemeriksaan dan penyidikan di bidang Pasar Modal	1. Terciptanya penegakan hukum di bidang pasar modal yang kredibel	1. Persentase Laporan Hasil Pemeriksaan yang dapat diterima oleh Ketua atau Komite Penetapan Sanksi dan Keberatan (KPSK).	80%	90%	34,0
		2. Terwujudnya kepastian hukum di bidang Pasar Modal dan memberikan perlindungan bagi pemodal dan masyarakat	2. Penyelesaian perilaku pelaku Pasar Modal yang menyimpang:			
			a. Persentase penyelesaian pelanggaran terhadap kewajiban pelaporan, baik berkala maupun insidental sesuai target waktu (keterlambatan penyampaian pelaporan)	90%	98%	
			b. Penyelesaian pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal yang memerlukan Surat Perintah Pemeriksaan sesuai target waktu.	70%	90%	

KEMENTERIAN/LEMBAGA: KEMENTERIAN KEUANGAN

No	PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
			c. Penyelesaian pelanggaran terhadap ketentuan pidana di bidang Pasar Modal yang memerlukan Surat Perintah Penyidikan sesuai target waktu	50%	70%	
d.	- Pengaturan, Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pengelolaan Investasi	1. Terwujudnya Biro Pengelolaan Investasi sebagai salah satu biro yang kredibel, akuntabel dan transparan 2. Terwujudnya industri pengelolaan investasi yang tangguh dan berdaya saing global	1. Capaian pelaksanaan pemeriksaan dalam satu tahun: a. Persentase pemeriksaan kepatuhan terhadap Manajer Investasi sesuai rencana b. Persentase pemeriksaan kepatuhan terhadap Agen Penjual Efek Reksa Dana sesuai rencana 2. Persentase layanan yang memenuhi target SOP: a. Layanan Pendaftaran Reksa Dana yang memenuhi target SOP b. Layanan Perizinan Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana yang memenuhi target SOP	100%	100%	20,8
e.	- Pengaturan, Pembinaan dan Pengawasan Bidang Transaksi dan Lembaga Efek	1. Terwujudnya Biro Transaksi dan Lembaga Efek sebagai salah satu biro di Bapepam-LK yang kredibel, akuntabel dan transparan 2. Terwujudnya Lembaga Efek yang berkualitas dan berdaya saing global serta Transaksi Efek yang teratur, wajar dan efisien	1. Persentase lama proses perijinan yang sesuai dengan target SOP. a. Proses perijinan Wakil Perantara Pedagang Efek. b. Proses perijinan Wakil Penjamin Emisi Efek 2. Persentase jumlah pemeriksaan Lembaga Efek yang dilaksanakan dibandingkan dengan yang direncanakan. 3. Persentase tingkat penyelesaian penelaahan hasil pengawasan transaksi efek yang dindikasikan tidak wajar	90%	100%	28,1
f.	- Penelaahan dan Pemantauan Perusahaan Emiten dan Perusahaan Publik Sektor Jasa	1. Meningkatnya tata kelola Perusahaan yang baik atas Emiten dan Perusahaan Publik Sektor Jasa	1. Persentase jumlah Laporan Keuangan Tahunan, Laporan Keuangan Tengah Tahunan, dan Laporan Tahunan yang ditelaah sesuai dengan rencana	100%	100%	14,4

KEMENTERIAN/LEMBAGA: KEMENTERIAN KEUANGAN

No	PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
		2. Meningkatnya jumlah Emiten dan Perusahaan Publik Sektor Jasa	2. Persentase jumlah pemrosesan Penyataan Pendaftaran sesuai SOP 3. Diterbitkannya produk regulasi terkait penyederhanaan proses dan persyaratan Penawaran Umum	100%	100%	
g.	- Penelaahan dan Pemantauan Perusahaan Emiten dan Perusahaan Publik Sektor Riil	1. Meningkatnya tata kelola perusahaan yang baik atas Emiten dan Perusahaan Publik Sektor Riil 2. Meningkatnya jumlah Emiten dan Perusahaan Publik Sektor Riil	1. Persentase jumlah Laporan Keuangan Tahunan, Laporan Keuangan Tengah Tahunan dan Laporan Tahunan yang ditelaah sesuai dengan rencana 2. Persentase jumlah pemrosesan Pernyataan Pendaftaran sesuai SOP 3. Diterbitkannya produk regulasi terkait penyederhanaan proses dan persyaratan Penawaran Umum	100%	100%	14,8
h.	- Pengaturan, Pembinaan, dan Pengawasan di bidang Lembaga Pembiayaan dan Penjaminan	1. Membangun otoritas Lembaga Pembiayaan dan Penjaminan yang profesional yang mampu mewujudkan industri jasa pembiayaan dan penjaminan sebagai penggerak ekonomi nasional yang tangguh dan berdaya saing tinggi 2. Terwujudnya industri jasa pembiayaan dan penjaminan yang sehat, kuat dan kompetitif dalam rangka melindungi kepentingan masyarakat	1. Persentase jumlah kebijakan di bidang pembiayaan dan penjaminan yang dihasilkan 2. Persentase jumlah peraturan di bidang pembiayaan dan penjaminan yang dihasilkan 3. Persentase perizinan perusahaan pembiayaan dan penjaminan sesuai SOP	100%	100%	23,5
i.	- Pengaturan, Pembinaan, dan Pengawasan bidang Perasuransian	1. Terwujudnya Biro Perasuransian yang memegang teguh prinsip akuntabilitas dan integritas 2. Meningkatnya peran dan kualitas pelaku industri perasuransian	1. Persentase jumlah rumusan peraturan di bidang perasuransian sesuai rencana 2. Persentase layanan pemberian izin usaha asuransi dan reasuransi yang memenuhi target SOP 3. Persentase jumlah laporan keuangan perusahaan asuransi dan reasuransi yang telah dianalisis sesuai dengan target waktu	100%	100%	39,0

KEMENTERIAN/LEMBAGA: KEMENTERIAN KEUANGAN

No	PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
j.	- Pengaturan, Pembinaan, dan Pengawasan Bidang Dana Pensiun	1. Terwujudnya Biro Dana Pensiun sebagai lembaga yang memegang teguh prinsip-prinsip tata kelola yang baik (<i>good government governance</i>)	1. Persentase pengesahan pembentukan dana pensiun yang sesuai dengan SOP	100%	100%	34,8
		2. Terwujudnya industri dana pensiun sebagai penopang pembangunan ekonomi nasional dan sarana untuk memenuhi kesejahteraan masyarakat di hari tua	2. Persentase jumlah laporan hasil analisis sesuai rencana	100%	100%	
			3. Persentase jumlah pemeriksaan langsung sesuai rencana	100%	100%	
TOTAL ALOKASI KEMENTERIAN KEUANGAN 2010-2014						80.337,7

K : Angka kumulatif 5 tahun (2010-2014)

**RENCANA TINDAK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH 2010-2014
PER KEMENTERIAN/LEMBAGA**

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
1	PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN PERTANIAN	Peningkatan pelaksanaan kegiatan Kementerian Pertanian melalui dukungan koordinasi, pembinaan dan pelayanan administrasi	Jumlah dokumen perencanaan, keuangan & perlengkapan, hukum & humas, kerjasama luar negeri, organisasi dan kepegawaian, statistik dan sistem informasi pertanian	24 paket	24 paket	7.832,0
			Jumlah ijin usaha pertanian, ijin pemasukan/pengeluaran benih/bibit, obat hewan dan pakan ternak, produk ternak dan agensia hayati, serta rekomendasi produk pangan	2500	5000	
			Realisasi penyaluran kredit program untuk pertanian (KKP-E, KUR)	1,5 trilyun	2,5 trilyun	
			Realisasi penyaluran pembiayaan Syariah dan pembiayaan komersial untuk sektor pertanian	4 trilyun	8 trilyun	
			Jumlah sentra-sentra usaha pertanian di perdesaan	200	200	
			Jumlah Gapoktan PUAP (unit)	10.000,00	10.000,00	
1.6	Pelayanan perizinan dan investasi pertanian (Prioritas Nasional dan Bidang)	Peningkatan penerimaan penyiapan bahan analisa, fasilitas proses teknis permohonan ijin, pendaftaran di bidang pupuk, pestisida dan alat mesin pertanian, benih/bibit, produk ternak dan pangan sgr serta penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi	Jumlah ijin usaha pertanian, ijin pemasukan/pengeluaran benih/bibit, obat hewan dan pakan ternak, produk ternak dan agensia hayati, serta rekomendasi produk pangan	2500	5000	64,1
			Bahan informasi dan bahan kebijakan pengembangan investasi pertanian (publikasi, pameran, bahan analisis untuk kebijakan pertanian) (PAKET)	1	1	

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
1.7	Pelayanan pembiayaan Pertanian, Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) dan Penguatan Kelembagaan Ekonomi Perdesaan Melalui LM3 (Prioritas Nasional dan Bidang)	Peningkatan realisasi penyaluran kredit program (KKP-E dan KUR) pembiayaan komersial, pembiayaan syariah, pengembangan sentra usaha pertanian perdesaan, dan pengembangan Gapoktan PUAP	Realisasi penyaluran kredit program untuk pertanian (KKP-E, KUR) (Trilyun)	1,5	2,5	5.621,6
			Realisasi penyaluran pembiayaan Syariah dan pembiayaan komersial untuk sektor pertanian (Trilyun)	4	8	
			Jumlah sentra-sentra usaha pertanian di perdesaan	200	200	
			Jumlah Gapoktan PUAP (unit)	10.000	10.000	
1.9	Pengembangan perlindungan dan pendaftaran varietas tanaman (Prioritas Bidang)	Peningkatan kinerja pelayanan teknis, hukum dan administrasi perlindungan varietas tanaman	Jumlah pelayanan teknis, hukum dan administrasi perlindungan varietas tanaman (buah)	300	700	38,7
2	PROGRAM PENGAWASAN DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS APARATUR KEMENTERIAN PERTANIAN	Pelaksanaan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di Kementerian Pertanian	Jumlah pelaksanaan kegiatan pengawasan intern pada unsur Kementerian Pertanian untuk mewujudkan good governance dan clean government (Kinerja/Satker)	384	384	345,2
			% proses administrasi dan dukungan teknis Itjen tepat waktu	100%	100%	
			% temuan laporan audit internal Kementerian Pertanian ditindaklanjuti			
			- Tahun Tunggal (awal)	65%	90%	
			- Rata-rata 5 tahun	79%	79%	
3	PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI, PRODUKTIVITAS DAN MUTU TANAMAN PANGAN UNTUK MENCAPAI SWASEMBADA DAN SWASEMBADA BERKELANJUTAN	Perluasan penerapan budidaya tanaman pangan yang tepat yang didukung oleh sistem penyediaan sarana produksi dan benih serta pengamanan produksi yang efisien untuk mewujudkan produksi tanaman pangan yang cukup dan berkelanjutan	Luas areal penerapan budidaya tanaman pangan yang tepat (ribu ha)	2.969,49	4.493,31	6.656,2
			Jumlah sarana produksi yang disediakan dan disalurkan serta lembaga perbenihan tanaman pangan yang dibina di lokasi penerapan budidaya tanaman pangan yang tepat :	-	-	
			- Sarana Produksi (Unit)	13.836,00	18.354,00	
			- Lembaga perbenihan (Balai)	63	63	

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
			Jumlah subsidi pupuk dan benih :	-	-	
			- Pupuk (Juta ton)	11,06	12,2	
			- Benih (ribu ton)	178,18	226,92	
			Luas areal yang aman dari serangan OPT dan DFI pada pertanaman pangan yang menerapkan budidaya tanaman yang tepat (ribu ha)	147,5	223,75	
			Luas Areal :			
			- Padi non hibrida (ribu ton)	12.544,00	15.680,00	
			- Padi hibrida (ribu ton)	1.509,20	3.773,00	
			- Padi lahan kering (ribu ton)	1.234,80	2.058,00	
			- Jagung (ribu ton)	926,25	1.543,75	
			- Kedelai (ribu ton)	356,25	712,5	
			- Kacang tanah (ribu ton)	59,23	236,93	
			- Kacang hijau (ribu ton)	3,3	25,72	
			- Ubi kayu (ribu ton)	115,63	117,07	
			- Ubi jalar (ribu ton)	103,05	121,49	
			Produktivitas :			
			- Padi non hibrida (ku/ha)	64	64	
			- Padi hibrida (ku/ha)	77	77	
			- Padi lahan kering (ku/ha)	42	42	
			- Jagung (ku/ha)	65	65	
			- Kedelai (ku/ha)	15	15	
			- Kacang tanah (ku/ha)	12,47	12,47	
			- Kacang hijau (ku/ha)	10,83	10,83	
			- Ubi kayu (ku/ha)	186,54	186,54	

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
			- Ubi jalar (ku/ha)	110,69	110,69	
			Luas Panen :			
			- Padi non hibrida (ribu ha)	2.000,00	2.500,00	
			Padi hibrida (ribu ha)	200	500	
			Padi lahan kering (ribu ha)	300	500	
			- Jagung (ribu ha)	150	250	
			- Kedelai (ribu ha)	250	500	
			- Kacang tanah (ribu ha)	50	200	
			- Kacang hijau (ribu ha)	3,21	25	
			- Ubi kayu (ribu ha)	6,53	6,61	
			- Ubi jalar (ribu ha)	9,5	11,2	
			- Padi non hibrida (ribu ha)	1.960,00	2.450,00	
			Padi hibrida (ribu ha)	196	490	
			Padi lahan kering (ribu ha)	294	490	
			- Jagung (ribu ha)	142,5	237,5	
			- Kedelai (ribu ha)	237,5	475	
			- Kacang tanah (ribu ha)	47,5	190	
			- Kacang hijau (ribu ha)	3,05	23,75	
			- Ubi kayu (ribu ha)	6,2	6,28	
			- Ubi jalar (ribu ha)	9,31	10,98	
3.1	Pengelolaan produksi tanaman serealia (Prioritas Nasional dan Bidang)	Meningkatnya perluasan penerapan budidaya tanaman serealia yang tepat dan berkelanjutan untuk	Luas areal penerapan budidaya serealia yang tepat dan berkelanjutan (ribu ha) :	2.650,20	3.750,40	2.259,0
			SLPTT padi non hibrida (ribu ha)	2.000,00	2.500,00	
			SLPTT padi hibrida (ribu ha)	200	500	
			SLPTT Padi lahan kering (ribu ha)	300	500	

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
			SLPTT Jagung hibrida (ribu ha)	150	250	
			Pengembangan peningkatan produksi gandum (ribu ha)	0,1	0,2	
			Pengembangan peningkatan produksi sorghum (ribu ha)	0,1	0,2	
			Peta sentra produksi komoditas serealia (paket)	1,00	1,00	
			Data luas tanam komoditas serealia	1,00	1,00	
3.2	Pengelolaan produksi tanaman kacang-kacangan dan umbi-umbian (Prioritas Nasional dan Bidang)	Meningkatnya perluasan penerapan budidaya tanaman kacang-kacangan dan umbi-umbian yang tepat dan berkelanjutan untuk peningkatan produksi melalui peningkatan produktivitas per satuan luas.	Luas areal penerapan budidaya tanaman kacang-kacangan dan umbi-umbian yang tepat dan berkelanjutan (ribu ha) :	319,29	742,91	1.256,5
			SLPTT kedelai (ribu ha)	250	500	
			SLPTT kacang tanah (ribu ha)	50	200	
			SLPTT kacang hijau (ribu ha)	-	25	
			PTT kacang hijau (ribu ha)	3,21		
			PTT ubi kayu (ribu ha)	6,53	6,61	
			PTT ubi jalar (ribu ha)	9,5	11,2	
			PTT pangan lokal (ribu ha)	0,05	0,1	
			Peta sentra produksi beberapa komoditas Kabi (paket)	1,00	1,00	
			Data luas tanam beberapa komoditas Kabi (paket)	1,00	1,00	
3.3	Pengelolaan sistem penyediaan benih tanaman pangan (Prioritas Bidang)	Terselenggaranya sistem pembinaan lembaga perbenihan tanaman pangan yang efisien dan berkelanjutan di lokasi penerapan budidaya tanaman pangan yang tepat	Lembaga perbenihan tanaman pangan yang dibina di lokasi penerapan budidaya tanaman pangan yang tepat :			334,0
			Tersusunnya roadmap kebutuhan & ketersediaan benih (paket)	1,00	1,00	
			Tersusunnya kebijakan sistem subsidi benih (paket)	1,00	1,00	

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
			Tersusunnya rancangan revitalisasi perbenihan (paket)	1,00	1,00	
			BPSBTPH (Balai)	32	32	
			BBI (Balai)	31	31	
3.4	Penyaluran subsidi benih tanaman pangan (Prioritas Nasional dan Bidang)	Tersalurnya benih tanaman pangan bersubsidi	Jumlah benih tanaman pangan bersubsidi (ribu ton)	178,18	226,92	
3.5	Pengelolaan sistem penyediaan dan pengawasan sarana produksi tanaman pangan (Prioritas Bidang)	Terselenggaranya sistem penyediaan dan pengawasan sarana produksi tanaman pangan yang efisien dan berkelanjutan di lokasi penerapan budidaya tanaman pangan yang tepat.	Sarana produksi tersedia dan terawasi di lokasi penerapan budidaya tanaman pangan yang tepat (unit) :	13.836,00	18.354,00	735,7
			Bantuan RPPPO (unit)	200	1.200,00	
			Bantuan Traktor R-2 (unit)	623	912	
			Bantuan Traktor R-4 (unit)	7	10	
			Bantuan pompa air (unit)	350	512	
			Penguatan UPJA pemula (unit)	8.747,00	8.071,00	
			Penguatan UPJA berkembang (unit)	2.864,00	4.313,00	
			Penguatan UPJA profesional (unit)	585	2.792,00	
			Penguatan KP3 (unit)	430	514	
			Penguatan PPNS Pupes (orang)	30	30	
			Skrening pestisida (unit)	30	30	
			Tersusunnya roadmap kebutuhan & penyediaan pupuk & alsintan (paket)	1,00	1,00	
3.6	Penyaluran pupuk bersubsidi (Prioritas Nasional dan Bidang)	Tersalurnya pupuk bersubsidi	Jumlah pupuk bersubsidi (juta ton)	11,06	12,2	
3.7	Penguatan perlindungan tanaman pangan dari gangguan OPT dan DFI (Prioritas Bidang)	Terkendalinya serangan OPT dan DFI di lokasi penerapan budidaya tanaman pangan yang tepat	Jumlah luas areal tanaman pangan yang terserang OPT (ribu ha) dan	59	89,5	526,3

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
			Jumlah luas areal tanaman pangan yang terkena DFI (ribu ha)	88,5	134,25	
3.8	Pengembangan metode pengujian mutu benih dan penerapan sistem mutu laboratorium pengujian benih (Prioritas Bidang)	Berkembangnya metode pengujian mutu benih dan penerapan sistem mutu laboratorium pengujian benih tanaman pangan dan hortikultura	Jumlah metode pengujian mutu benih yang dikembangkan, divalidasi dan disahkan (metode),	8	8	37,2
			Jumlah laboratorium yang menerapkan sistem mutu (laboratorium),	8	8	
			Jumlah laboratorium peserta uji profisiensi (laboratorium), dan	30	30	
			Jumlah pelaksanaan uji petik mutu benih yang beredar (contoh benih)	15	25	
3.9	Pengembangan peramalan serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (Prioritas Bidang)	Tersedianya informasi dan model peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) sebagai rujukan dalam pengamanan produksi tanaman pangan dan hortikultura	Jumlah informasi peramalan serangan OPT (unit),	5	5	44,6
			Jumlah teknologi pengamatan, peramalan dan pengendalian OPT (model), dan	8	8	
			Jumlah propinsi yang menerapkan teknologi pengamatan, peramalan dan pengendalian OPT (propinsi)	6	18	
4.	PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI, PRODUKTIVITAS DAN MUTU PRODUK TANAMAN HORTIKULTURA BERKELANJUTAN	Terwujudnya agribisnis hortikultura yang berdaya saing dan berkelanjutan	Produksi Hortikultura : (Ton)			2.239,5
			buah	19.216.575	23.805.903	
			Sayuran	10.483.440	12.264.052	
			Tanaman Hias	216.675.019	278.745.121	
			Biofarmaka	511.416.046	598.284.439	

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
			Laju Pertumbuhan Produksi : (%)			
			buah	5	5,6	
			Sayuran	3,5	4,2	
			Tanaman Hias	6	6,5	
			Biofarmaka	3,5	4	
			Volume dan nilai perdagangan dalam negeri dan ekspor	Buah : 5 %, Tanaman Hias 5 %	Buah : 5 %, Tanaman Hias 5 %	
			PDB Sub Sektor Hortikultura (Milyar)	88,86	108,28	
4.2	Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Buah Berkelanjutan (Prioritas Nasional dan Bidang)	Berkembangnya sistem agribisnis yang efisien dan berkelanjutan yang mampu menyediakan produk buah yang cukup, bermutu dan aman konsumsi	Laju pertumbuhan produksi tanaman buah	5%	5,60%	429,9
			Proporsi produk buah bermutu di pasar	20%	50%	
4.3	Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Sayuran dan Biofarmaka Berkelanjutan (Prioritas Nasional dan Bidang)	Berkembangnya sistem agribisnis yang efisien dan berkelanjutan yang mampu menyediakan produk sayuran dan biofarmaka yang cukup, bermutu dan aman konsumsi	Laju pertumbuhan produksi Tanaman Sayuran dan Biofarmaka (kenaikan terhadap tahun sebelumnya)	3,50%	4,20%	442,0
			Laju pertumbuhan luas panen Tanaman sayuran dan biofarmaka (Kenaikan terhadap tahun sebelumnya)	2,50%	2,50%	
4.4	Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Hias Berkelanjutan (Prioritas Nasional dan Bidang)	Berkembangnya sistem agribisnis yang efisien dan berkelanjutan yang mampu menyediakan produk	Laju pertumbuhan produksi Tanaman Hias	6,5	6,5	447,8
			Proporsi tanaman hias segar bermutu di pasar	10	20	
4.5	Pengembangan sistem perbenihan, pupuk dan sarana produksi lainnya (Prioritas Nasional dan Bidang)	Peningkatan usaha/produsen benih, pupuk dan sarana produksi lainnya guna mendukung keberlanjutan ketersediaan produk hortikultura yang berdaya saing.	% jumlah usaha/produsen benih hortikultura			312,9
			* buah (%)	3	3	
			* Sayuran (%)	2	2	
			* Tanaman Hias (%0	1	1	
			* Biofarmaka (%)	2	2	
			% penggunaan benih bermutu			

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
			* buah (%)	60	80	
			* Sayur umbi (%)	17	30	
			* Sayur biji (%)	75,2	80,9	
4.6	Pengembangan Sistem Perlindungan Tanaman Hortikultura (Prioritas Bidang)	Berkembangnya sistem perlindungan tanaman dalam mendukung pengembangan agribisnis hortikultura	Proporsi luas serangan OPT utama hortikultura terhadap total luas panen. (maksimal terhadap luas panen)	5%	5%	281,1
5.	PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI, PRODUKTIVITAS DAN MUTU TANAMAN PERKEBUNAN BERKELANJUTAN	Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman perkebunan yang berkelanjutan melalui upaya pengembangan tanaman semusim, tanaman rempah dan penyegar, tanaman tahunan, dukungan penyediaan benih unggul bermutu dan sarana produksi, perlindungan perkebunan serta dukungan manajemen dan teknis lainnya	· Capaian produksi (ribu ton) komoditi unggulan perkebunan (tebu, kapas, nilam, tembakau, kopi, teh, kakao, lada, cengkeh, kelapa, kelapa sawit, jambu mete dan jarak pagar); - <i>Swasembada gula nasional</i> Tebu (hablur)	2.996	4.806	3.527,3
			- <i>Koordinasi dalam perumusan kebijakan dan pemantauan ketersediaan dan distribusi pangan di 33 Provinsi</i>			
			- <i>Pengembangan komoditas pemenuhan konsumsi dalam negeri</i>			
			Kapas	26	63	
			Cengkeh	78	86	
			- <i>Pengembangan komoditas ekspor</i>			
			Tembakau	181	184	
			Nilam	91	124	
			Kopi	698	738	
			Teh	168	182	
			Kakao	988	1.648	
			Lada	83	92	

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
			Jambu mete	145	159	
			Karet	2681	2801	
			- <i>Penyediaan bahan tanaman sumber bahan bakar nabati (bioenergi)</i>			
			Jarak pagar	15	35	
			Kelapa	3.266	3.380	
			Kelapa Sawit	23.200	28.439	
			Kemiri sunan	0	0	
			• Peningkatan produktivitas (kg/ha) tanaman unggulan perkebunan (tebu, kapas, nilam, tembakau, kopi, teh, kakao, lada, cengkeh, kelapa, kelapa sawit, jambu mete dan jarak pagar);			
			- <i>Swasembada gula nasional</i>			
			Tebu	6450	7230	
			- <i>Pengembangan komoditas pemenuhan konsumsi dalam negeri</i>			
			Kapas	1750	2500	
			Cengkeh	266	300	
			- <i>Pengembangan komoditas ekspor</i>			
			Tembakau	885	893	
			Nilam	6300	6600	
			Kopi	780	900	
			Teh	1520	1780	
			Kakao	1000	1500	
			Lada	694	760	
			Karet	999	1019	

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
			Jambu Mete	537	640	
			- <i>Penyediaan bahan tanaman sumber bahan bakar nabati (bioenergi)</i>			
			Jarak Pagar	1000	2000	
			Kelapa	1105	1200	
			Kelapa Sawit	3888	4344	
			Kemiri Sunan	0	0	
			• Peningkatan mutu (% populasi standar) tanaman unggulan perkebunan (tebu, kapas, nilam, tembakau, kopi, teh, kakao, lada, cengkeh, kelapa, kelapa sawit, jambu mete dan jarak pagar);	76	80	
			• Penggunaan benih unggul bermutu, sarana produksi serta sumber benih bina perkebunan			
			- Jumlah penggunaan sarana produksi (%) (Revitalisasi perbenihan dan pembibitan)	45	65	
			• Penguatan kelembagaan pengawas dan kelembagaan usaha perbenihan (Revitalisasi perbenihan dan perbibitan)			
			- Jumlah kelembagaan perbenihan (unit)	210	270	
			- Jumlah kelembagaan UPJA (unit usaha)	59	114	
			• Jumlah kelembagaan perlindungan tanaman			
			SL-PHT	500	563	
			• Jumlah areal pengendalian OPT (hektar) dan penurunan titik api (hot spot) serta penanganan gangguan usaha perkebunan			
			Jumlah penurunan titik api	2500	1640	

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
			Ø Jumlah kelembagaan perbenihan (unit)	210	270	
			Ø Jumlah kelembagaan UPJA (unit usaha)	59	114	
			· Jumlah kelembagaan perlindungan tanaman	500	563	
			Ø SL-PHT			
			· Jumlah areal pengendalian OPT (hektar) dan penurunan titik api (hot spot) serta penanganan gangguan usaha perkebunan;	2.500	1.640	
			Ø Jumlah penurunan titik api	36	44	
			Jumlah penanganan kasus GUP			
5.1	Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman semusim (Prioritas Nasional dan Bidang)	· Terfasilitasinya pengembangan budidaya tanaman semusim (tebu,kapas, tembakau dan nilam)	· Capaian luas areal (ribu hektar) pembinaan dan pengembangan tanaman semusim : - <i>Swasembada Gula Nasional</i>	-	-	251,8
			Ø Tebu	465	641	
			- <i>Pengembangan Komoditas Pemenuhan Konsumsi Dalam Negeri</i>			
			Ø Kapas	15	25	
			- <i>Pengembangan Komoditas Ekspor</i>			
			Ø Tembakau	205	205	
			Ø Nilam	14	18	
5.2	Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman rempah dan penyegar (Prioritas Nasional dan Bidang)	· Terfasilitasinya pengembangan budidaya tanaman rempah dan penyegar (kopi, teh, kakao, lada, cengkeh)	· Peningkatan luas areal (ribu hektar) pembinaan dan pengembangan tanaman rempah dan penyegar : - <i>Pengembangan Komoditas Ekspor</i>			1.254,6
			Ø Kopi	1.291	1.354	
			Ø Teh	129	130	
			Ø Kakao	1.655	2.020	
			Ø Lada	192	196	

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
			- Pengembangan Komoditas Pemenuhan Konsumsi Dalam Negeri			
			Ø Cengkeh	465	484	
			- Gerakan Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao Nasional (ribu ha)			
			Rehabilitasi	81,85	10,00	
			Intensifikasi	30,55	20,00	
			Peremajaan	22,60	5,00	
			Pengendalian OPT	135,00	35,00	
			Pemberdayaan petani (kelompok Tani)	6.750,00	1.750,00	
5.3	Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman Tahunan (Prioritas Nasional dan Bidang)	- Terfasilitasinya pengembangan budidaya tanaman tahunan (kelapa, kelapa sawit, karet, jambu mete, jarak pagar)	- Peningkatan luas areal (ribu hektar) pembinaan dan pengembangan tanaman tahunan	-	-	437,4
			- Pengembangan Komoditas Ekspor			
			Karet	3.445	3.487	
			Jambu Mete	573	577	
			- Penyediaan bahan tanaman sumber bahan bakar nabati (bio energi)			
			Jarak Pagar	10	21	
			Kelapa	3.807	3.833	
			Kelapa Sawit	8.127	8.987	
			Kemiri sunan	1	10	
			- Revitalisasi perkebunan			
			Kelapa sawit	125	148	
			Karet	10	51	
			Kakao	0	32	

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
			- Penyusunan kebijakan Pengembangan bio energi			
			√ <i>Pengembangan Desa Mandiri Energi (DME)</i>			
			√ Koordinasi dengan pihak terkait dalam menyediakan insentif pajak untuk mendorong pematapan energy terbarukan			
			√ Berpartisipasi aktif dalam Tim Koordinasi Interdept pengembangan bio-fuel			
			√ <i>Pengembangan integrasi kebun-ternak (paket)</i>	27	31	
5.4	Dukungan penyediaan benih unggul bermutu dan sarana produksi perkebunan (Prioritas nasional dan Bidang)	· Terfasilitasinya penyediaan benih unggul bermutu dalam rangka mendukung peningkatan produktivitas dan mutu tanaman perkebunan	· Jumlah penggunaan benih unggul bermutu dan sarana produksi perkebunan (%)	-	-	169,4
			- Revitalisasi Perbenihan			
			Jumlah penggunaan benih unggul bermutu	45	60	
5.5	Dukungan perlindungan perkebunan dan penanganan gangguan usaha perkebunan (Prioritas Bidang)	Terfasilitasinya pengamatan dan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT) tanaman perkebunan pada 13 komoditas perkebunan	· Revitalisasi Perlindungan Perkebunan	-		127,3
			- Areal pengendalian OPT dan intensitas serangan OPT (ha)	51.467	54.841	
			Ø Penanganan gangguan usaha perkebunan (<i>dukungan pengembangan tanaman perkebunan berkelanjutan</i>)	36	44	
			· Jumlah luas areal perkebunan yang terkena dampak perubahan iklim (ha)	-	8.000	

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
5.6	Dukungan pengujian dan pengawasan mutu benih serta penerapan teknologi proteksi tanaman perkebunan (Prioritas Bidang)	· Terlaksananya pengawasan dan pengujian benih tanaman perkebunan	Jumlah bibit yang tersertifikasi (dalam 1.000 batang)	201.542	255.869	352,8
		· Terlaksananya penerapan teknologi proteksi tanaman perkebunan	Pelaksanaan analisadata serangan, situasi dan identifikasi OPT, koleksi OPT penting, pengembangan metode pengamatan, teknik survailance, model peramalan, teknik survailance, model peramalan OPT, fenomena iklim dan gangguan usaha serta taksasi kehilangan hasil, teknik pengendalian OPT dengan PHT	-	-	
		· Ø Jumlah teknologi terapan perlindungan perkebunan (paket)		19	25	
6.	PROGRAM PENCAPAIAN SWASEMBADA DAGING SAPI DAN PENINGKATAN PENYEDIAAN PANGAN HEWANI YANG AMAN, SEHAT, UTUH DAN HALAL	Meningkatnya ketersediaan pangan hewani (daging, telur, susu)	· Produksi daging meningkat 4,10% per tahun (ton)	2.201.214	2.584.432	6.571,3
			· Produksi telur meningkat 4,42% per tahun (ton)	1.506.837	1.791.609	
			· Produksi susu meningkat 15,56% per tahun (ton)	727.539	1.297.034	
		Meningkatnya kontribusi ternak domestik dalam penyediaan pangan hewani (daging dan telur)	· Kontribusi daging sapi domestik terhadap total produksi daging sapi nasional meningkat (%)	-	-	
			· Kontribusi daging ayam buras terhadap total produksi daging ayam nasional meningkat (%)	-	-	
Meningkatnya ketersediaan protein hewani asal ternak	· Ketersediaan protein hewani asal ternak per kapita meningkat 0,03% per tahun (g/kapita/hr)	-	-			
6.1	Peningkatan kuantitas dan kualitas benih dan bibit dengan mengoptimalkan sumber daya lokal (Prioritas nasional dan Bidang)	Peningkatan kualitas dan kuantitas benih dan bibit ternak (sapi potong, sapi perah, domba, kambing, ayam buras, itik) yang bersertifikat melalui:	· Peningkatan kuantitas semen (dosis)	2.700	4.000	1.021,0
			· Penguatan kelembagaan perbibitan yang menerapkan Good Breeding Practices	· Peningkatan produksi embrio	400	

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
		<ul style="list-style-type: none"> · Peningkatan penerapan standar mutu benih dan bibit ternak · Peningkatan penerapan teknologi perbibitan · Pengembangan usaha dan investasi perbibitan 	<ul style="list-style-type: none"> · Bibit sapi · Bibit unggas lokal · Bibit Kambing/domba 	2.625	4.150	
				60.000	84.800	
				2.000	2.820	
6.2	Peningkatan produksi ternak ruminansia dengan pendayagunaan sumber daya lokal (Prioritas Nasional dan Bidang)	Meningkatnya populasi dan produksi ternak ruminansia	Peningkatan produksi dan produktivitas ternak (sapi ekor)	21.000	31.625	2.418,7
			Swasembada daging sapi (share produk dalam negeri %)	76	90	
			Pemanfaatan kotoran ternak menjadi pupuk organik dan pemberian paket bantuan sosial pupuk organik (rumah kompos) (Dampak Perubahan Iklim)	0	10.000	
			Pengembangan dan pembinaan Biogas Asal Ternak Bersama Masyarakat (BATAMAS) terutama di sentra terencil dan padat ternak (unit) (Dampak Perubahan Iklim)	100	300	
			Pengembangan integrasi ternak dan tanaman melalui pengelolaan kotoran ternak (padat & cair) menjadi pupuk organik dan pengolahan limbah tanaman untuk ternak terutama di sentra perkebunan, tanaman pangan dan horti kulture (klp) (Dampak Perubahan Iklim)	75	110	
6.3	Peningkatan produksi ternak non ruminansia dengan pendayagunaan sumber daya lokal (Prioritas Nasional dan Bidang)	Meningkatnya populasi dan produksi, serta meningkatnya pendayagunaan sumber daya lokal ternak non ruminansia	Pengembangan kelompok unggas lokal	230	470	611,4
			Pengembangan kelompok non unggas	28	72	
			Pengembangan pakan ternak	25	70	
			Pengembangan alsin ternak	50	45	

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
6.4	Pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan menular strategis dan penyakit zoonosis (Prioritas Bidang)	· Penguatan kelembagaan kesehatan hewan	Penguatan otoritas veteriner melalui Puskesmas dan lab (unit)	110	140	1.148,2
		· Perlindungan hewan terhadap penyakit eksotik	Terlaksananya vaksinasi dan pengobatan thd penyakit hewan (juta dosis)	100	140	
		· Terjaminnya mutu obat hewan	Terlaksananya pengambilan dan pemeriksaan sampel dim rangka survailance PHMSZE (ribu sampel)	200	280	
			Terlaksananya produksi dan pendaftaran dan pengawasan obat hewan yang beredar di Indonesia (produk/merek)	250	350	
6.5	Penjaminan pangan asal hewan yang aman dan halal serta pemenuhan persyaratan produk hewan non pangan (Prioritas Nasional dan Bidang)	· Penguatan peran dan fungsi lembaga otoritas veteriner	Jumlah kebijaka kesmavet (pedoman)	25	31	1.059,7
		· Peningkatan jaminan produk hewan ASUH dan daya saing produk hewan	-	-		
		· Tersosialisasikannya resiko residu dan cemaran pada produk hewan serta zoonosis kepada masyarakat dan tersedianya profil keamanan produk hewan nasional serta peta zoonosis	Pertumbuhan terpenuhinya persyaratan dan standar keamanan dan mutu produk hewan pangan dan non pangan (RPU,RPH,RPB,TPU,KIOS DAGING,TPS) Unit	169	400	
		· Peningkatan penerapan kesrawan di RPH/RPU	Jumlah lab yang dibina (unit)	35	41	
7.	PROGRAM PENINGKATAN NILAI TAMBAH DAYA SAING, INDUSTRI HILIR, PEMASARAN DAN EKSPOR HASIL PERTANIAN	Meningkatnya usaha pengolahan dan pemasaran hasil pertanian berkelanjutan	% penurunan kehilangan/kerusakan hasil tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan / tahun	0,2 – 5%	0,2 – 5%	2.104,0
			% peningkatan produk dan jenis olahan hasil pertanian yang bermutu untuk ekspor dan substitusi impor/tahun	5%	5%	

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
			% peningkatan jumlah lembaga pemasaran petani dan penyerapan pasar hasil pertanian di pasar domestik/tahun	5%	5%	
			% peningkatan ekspor dan surplus neraca perdagangan hasil pertanian /tahun	15%	15%	
7.1	Pengembangan penanganan pasca panen pertanian (Prioritas Nasional dan Bidang)	Meningkatnya penanganan pasca panen hasil pertanian	Jumlah kelompok tani yang menerapkan penanganan pasca panen sesuai GHP dan standar mutu (poktan/gapoktan)	1800	2520	328,8
7.2	Pengembangan pengolahan hasil pertanian (Prioritas Nasional dan Bidang)	Berkembangnya pengolahan hasil pertanian yang berkelanjutan	Jumlah usaha pengolahan hasil pertanian yang bernilai tambah dan berdaya saing (unit)	11200	4000	777,5
7.3	Pengembangan mutu dan standardisasi pertanian (Prioritas Nasional dan Bidang)	Meningkatnya mutu dan keamanan pangan hasil pertanian	Jumlah usaha pasca panen dan pengolahan yang menerapkan sistem jaminan mutu.	330 unit + 54 unit organik	330 unit + 54 unit organik	303,0
			Jumlah pengujian mutu alat mesin pertanian (sertifikat)	42	42	
7.4	Pengembangan pemasaran domestik (Prioritas Bidang)	Meningkatnya pemasaran hasil pertanian	Jumlah kelembagaan pemasaran bagi petani (pasar)	186	223	386,9
			Jumlah hasil pertanian yang diserap pasar dalam negeri	0%	5%	
7.5	Pengembangan pemasaran internasional (Prioritas Nasional dan Bidang)	Meningkatnya pemasaran internasional hasil pertanian	Jumlah ekspor dan surplus neraca perdagangan hasil pertanian	Meningkat 15% dan 30%	Meningkat 15% dan 30%	278,5
8.	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN	Terlaksananya pengembangan fasilitas dalam pengelolaan lahan dan air melalui upaya pemberdayaan lahan pertanian, pengelolaan air irigasi pertanian dan perluasan areal pertanian	· Terlaksananya 2.000.000 (ha), 25.884 unit kegiatan pengelolaan air irigasi			19.725,2
			· Terlaksananya 2.000.000 (Ha) perluasan areal lahan Pertanian			
			· Terlaksananya 1.000.000 Ha optimasi lahan pertanian (pupuk organik), dan 12.500 Km JUT/Jalan produksi			
8.1	Perluasan areal pertanian (Prioritas Nasional dan Bidang)	Meningkatnya luasan areal baru lahan pertanian dalam mendukung peningkatan produksi pertanian	Luasan (Ha) perluasan areal Tanaman pangan (saawah dan lahan Kering), hortikultura, perkebunan Dan kawasan peternakan	32.505	2.000.000 ^{K)}	13.085,8

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
8.2	Pengelolaan air untuk pertanian (Prioritas Nasional dan Bidang)	Meningkatnya ketersediaan air irigasi untuk pertanian	Tersedianya (unit) pengembangan sumber air alternatif skala kecil (melalui irigasi pedesaan, pengembangan sumber air tanah, pompanisasi air permukaan) yang berfungsi.	1.005	7.085 ^{K)}	3.649,7
			Tersedianya optimasi pemanfaatan Air irigasi (melalui perbaikan JITUT/JIDES dan pengembangan TAM) yang berfungsi (ha)	108.486	2.000.000 ^{K)}	
			Tersedianya (unit) pengembangan Konservasi air (melalui pengembangan Embung, chek dam, sumur resapan, Antisipasi kekeringan dan banjir) yang berfungsi	464	18.799 ^{K)}	
8.3	Pengembangan pengelolaan lahan pertanian (Prioritas Nasional dan Bidang)	Meningkatnya produktivitas lahan pertanian, dan prasarana Jalan Usaha Tani/Jalan Produksi serta pengendalian lahan untuk mendukung peningkatan produksi pertanian	Terlaksananya Lahan yang dioptimasi, dikonservasi, direhabilitasi dan direklamasi	25.709	74.648	2.979,7
			Konservasi DAS Hulu 160.000 Ha (Adaptasi Iklim)	9.600	160.000 ^{K)}	
			Terbangunnya Rumah Kompos 6.500 unit	235	6.500 ^{K)}	
			Terlaksananya Pengembangan Systeme of Rice Intensificaion 2000 paket (adaptasi iklim)	62	2.000 ^{K)}	
			Tersedianya data bidang tanah petani yang disertifikasi 200.000 persil	726	200.000 ^{K)}	
			Tersedianya jalan sepanjang 12.500 km untuk JUT dan jalan produksi, serta tersedianya data bidang tanah petani yang layak disertifikasi	952	12.500 ^{K)}	

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
9.	PROGRAM PENCIPTAAN TEKNOLOGI DAN VARIETAS UNGGUL BERDAYA SAING	Peningkatan inovasi dan adopsi teknologi pertanian	Inovasi teknologi benih, bibit, pupuk, obat hewan dan tanaman, alsintan, dan produk olahan (paket)	98	200	5.456,5
			Inovasi teknologi pengelolaan sumberdaya pertanian (paket)	35	35	
			Rekomendasi kebijakan pertanian (paket)	33	33	
			Adopsi inovasi teknologi benih, bibit, pupuk, obat hewan dan tanaman, alsintan dan produk olahan (propinsi)	32	32	
9.2	Penelitian Dan Pengembangan Tanaman Pangan (Prioritas Nasional dan Bidang)	Peningkatan inovasi teknologi tanaman pangan mendukung ketahanan dan kemandirian pangan	Jumlah varietas unggul baru padi, sereal, kacang-kacangan & umbi-umbian	5 - 6	14 - 15	657,3
			Jumlah teknologi budidaya, panen dan pasca panen primer	5	8	
			Jumlah akses sumberdaya genetik (SDG) padi, sereal, kacang-kacangan dan umbi-umbian terkoleksi, teridentifikasi dan terkonservasi untuk perbaikan sifat varietas	800	800	
			Jumlah produksi benih sumber (BS, FS) padi, sereal, kacang-kacangan & umbi-umbian dengan SMM ISO 9001-2000	BS 10 ton FS 20 ton	BS 15 ton FS 20 ton	
9.3	Penelitian Dan Pengembangan Tanaman Hortikultura (Prioritas Nasional dan Bidang)	Meningkatnya inovasi teknologi tan.hortikultura mendukung pengembangan kawasan hortikultura	Jml VUB yg diminati knsumen	40	1032	377,3
			Jumlah PN yang terkonservasi dan terkarakterisasi	20 Bw, 455 acc, 3925	600 acc 4100	
			Jml benih sumber :			
			Sayuran	20.000 GO 20 ton	28.000 GO 40 ton	
				14335 batang	18700 batang	
			VUB buah trop dan sub trop	960	960	

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
			Akresi mutasi buah trop	151800	254000	
			Planlet, benih, stek tan hias			
			- Jumlah benih bt bwk dan bt atas hsl SE	100000	5000000	
			Jumlah teknologi prod hortikultura ramah lingkungan	12	12	
9.4	Penelitian Dan Pengembangan Tanaman Perkebunan (Prioritas Nasional dan Bidang)	Peningkatan inovasi tek. tan. perkebunan untuk meningkatkan produktivitas, diversifikasi dan nilai tambah tan. perkebunan	Jumlah varietas/klon unggul tanaman perkebunan	10	15	579,8
			Jumlah teknologi untuk peningkatan produktivitas tanaman perkebunan	42	52	
			Jumlah produk olahan tanaman perkebunan	20	33	
9.5	Penelitian Dan Pengembangan Peternakan Dan Veteriner (Prioritas Nasional dan Bidang)	Meningkatkan Inovasi Teknologi Peternakan dan Veteriner Mendukung Program Percepatan Produksi Swasembada Daging Sapi (P2SDS)	Jumlah rekamendari pembangunan peternakan dan veteriner, diseminasi, promosi, publikasi hasil penelitian dan koordinasi dengan stakeholders	10	10	511,3
			Jumlah SDG peternakan, TPT dan veteriner yang dikonservasi dan dikarakterisasi	112	112	
			Jumlah galur baru ternak dan TPT yang dihasilkan	6	8	
			Jumlah inovasi peternakan, TPT dan veteriner yang dihasilkan dan dialihkan/didesiminasikan kepada pengguna	22	25	
9.6	Penelitian/Analisis Sosial Ekonomi Dan Kebijakan Pertanian (Prioritas Bidang)	Hasil penelitian/ analisis sosial ekonomi dan rekomendasi kebijakan pertanian	Jumlah rekomendasi kebijakan tentang Penguatan daya saing dan perlindungan usaha pertanian; Pengelolaan sumberdaya pert. & pembangunan infrastruktur pert.; Pengembangan kelembagaan dan peraturan mendorong iklim usaha yg kondusif; Makro ekonomi mendorong pertumbuhan sektor pertanian; Pembangunan pert.& perdesaan	12	12	98,7

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
9.7	Pengembangan Perpustakaan Dan Penyebaran Teknologi Pertanian (Priorita Bidang)	Meningkatnyapenyebaran teknologi hasil litbang pertanian mendukung ketahanan dan kemandirian pangan	Jumlah judul jurnal primer dan publikasi bibliografis (judul)	13	13	78,1
			Jumlah perpustakaan yang dibina dan ditata (UK/UOT)	65	65	
			Jumlah tambahan koleksi	30 jdl/3 dtbase	50 jdl/ 4 dtbase	
			Jumlah kegiatan diseminasi dan perpustakaan (Keg)	8	8	
9.8	Penelitian/Perekayasaan dan Pengembangan Mekanisasi Pertanian (Prioritas Bidang)	Meningkatnya inovasi dan adopsi teknologi mekanisasi pertanian untuk peningkatan produktiifitas, efisiensi dan nilai tambah produk pertanian dan limbahnya	Inovasi teknologi dan sistem mekanisasi pertanian untuk peningkatan; produktivitas, efisiensi, kualitas, nilai tambah komoditas utama pertanian dan limbahnya	4	4	82,2
			Kerjasama litbang mektan serta bahan rekomendasi kebijakan (paket)	3	3	
			Prototipe alsin yang didiseminasikan (Paket)	1	1	
9.9	Penelitian Dan Pengembangan Sumberdaya Lahan Pertanian(Prioritas Nasional dan Bidang)	Tersedianya data, informasi dan peningkatan inovasi teknologi pengelolaan sumberdaya lahan pertanian	Tersedianya peta potensi sumberdya lahan pertanian	2,5 juta ha di Sulawesi dan daerah lainnya	15,5 juta Ha ^{K)}	295,1
			Jumlah informasi, paket komponen teknologi pengelolaan SDL (tanah, air, perubahan iklim, pupuk dan lingkungan pertanian) (paket)	12	11	

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
9.10	Penelitian Dan Pengembangan Bioteknologi Dan Sumber Daya Genetik Pertanian (Prioritas Nasional dan Bidang)	Peningkatan inovasi dan adopsi hasil bioteknologi dan pemanfaatan sumberdaya genetik pertanian (SDGP) untuk mendukung ketahanan pangan dan peningkatan daya saing produk pertanian	Jumlah akses SDGP dan database yang dikonservasi atau diremajakan	2250 akses; 4 dtbase	2250 akses; 4 dtbase	173,1
			Jumlah varietas atau galur harapan padi, kedelai, dan jagung berproduktivitas tinggi dan berumur genjah	51 galur kedelai dan padi; 3 populasi baru padi; 6 galur transgenik	5 Galur transgenik (LUT)	
			Jumlah galur harapan gandum tropis		Galur gandum adaptif iklim LUT	
			Jumlah galur padi dan jagung efisien penggunaan pupuk sintetik	125 galur calon hibrida jagung unggul	2-4 varietas unggul hibrida jagung Galur padi transgenik	
			Jumlah biofertilizer untuk padi dan tebu	20 isolat potensial biofertilizer	1 biofertilizer tebu	
			Jumlah tanaman manggis dan durian tanpa biji	2 metode regenerasi dan transformasi	Bahan sambungan	
			Jumlah peta gen sifat-sifat penting pada kelapa sawit, jarak pagar dan sapi	7 sekuens whole genom	-	

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
9.11	Penelitian Dan Pengembangan Pascapanen Pertanian (Prioritas Nasional dan Bidang)	Meningkatnya inovasi teknologi pascapanen dan pengembangan produk hasil pertanian	Jumlah teknologi penanganan segar produk hortikultura	5	2	93,3
			Jumlah produk diversifikasi pangan dan substitusi pangan impor	6	8	
			Jumlah produk pengembangan/ product development untuk peningkatan nilai tambah	2	10	
9.12	Pengkajian Dan Percepatan Diseminasi Inovasi Teknologi Pertanian (Prioritas Bidang)	Pengembangan teknologi pertanian serta pembinaan dan koordinasi kegiatan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian	Jumlah koordinasi penyusunan penganggaran, pelaksanaan dan movev kegiatan di Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (koordinasi)	10	10	1.934,7
			Jumlah advokasi teknis dan kebijakan operasional pembangunan pertanian wilayah, regional, dan nasional (advokasi)	34	69	
			Jumlah adaptasi teknologi spesifik lokasi (teknologi)	64	96	
10.	PROGRAM PENGEMBANGAN SDM PERTANIAN DAN KELEMBAGAAN PETANI	Pengembangan SDM pertanian, melalui pemberdayaan SDM dan kelembagaan petani	Jumlah aparatur di sektor pertanian yang diberdayakan dan dikembangkan kapasitasnya melalui kegiatan penyuluhan, pendidikan dan pelatihan, serta sertifikasi profesi SDM pertanian (orang)	48.853	102.983	6.852,1
			Jumlah non aparatur di sektor pertanian yang diberdayakan dan dikembangkan kapasitasnya melalui kegiatan penyuluhan, pendidikan dan pelatihan, serta sertifikasi profesi SDM pertanian (orang)	19.091	29.278	
			Jumlah kelembagaan Petani yang ditumbuhkembangkan dan diberdayakan kapasitasnya melalui penyuluhan dan pelatihan pertanian (unit)	28.344	72.880	
10.1	Pengembangan reorientasi pendidikan pertanian (Prioritas Bidang)	Mengembangkan program pendidikan pertanian	Persentase jumlah kegiatan pendidikan pertanian yang dirancang dan dianggarkan(%)	80	80	497,5
			Jumlah jenis profesi SDM Pertanian yang terstandarisasi dan tersertifikasi (jenis)	3	3	

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
		Mengembangkan kelembagaan pendidikan pertanian	Jumlah kelembagaan pendidikan yang ditingkatkan kualitasnya (lembaga)	25	25	
		Mengembangkan ketenagaan pendidikan pertanian	Jumlah tenaga fungsional dan profesi yang sesuai dengan standar kompetensi (orang)	600	600	
			Jumlah SDM Pertanian yang ditingkatkan kompetensinya melalui Diklat Fungsional dan Diklat Profesi yang sesuai dengan standar kompetensi(orang)	3.000	3.000	
			Jumlah aparatur yang meningkat jenjang pendidikan formal	100	100	
			Jumlah lulusan DIV di bidang RIHP	750	600	
			Jumlah SDM Pertanian yang ditingkatkan kompetensinya melalui pendidikan SPP(orang)	4.000	4.000	
			Jumlah lulusan yang mengikuti retooling di bidang pertanian	600	600	
		Peningkatan kerjasama pendidikan pertanian di dalam dan luar negeri	Persentase Jumlah kegiatan kerjasama pendidikan di dalam dan di luar negeri yang dirancang dan dilaksanakan (%)	60	60	
10.2	Pemantapan sistem pelatihan pertanian (Prioritas Bidang)	Menumbuh kembangkan kelembagaan pelatihan dan kelembagaan petani	jumlah kelembagaan UPT Pusat dan P4S yang terakreditasi	40	880	968,1
		Meningkatkan kualitas dan kuantitas ketenagaan pelatihan pertanian				
		- Mengembangkan pelatihan aparatur pertanian	Jumlah aparatur pertanian yang ditingkatkan kompetensinya melalui pelatihan (orang)	17.010	27.983	
		- Mengembangkan pelatihan non aparatur pertanian	Jumlah non aparatur pertanian yang ditingkatkan kompetensinya melalui pelatihan(orang)	14.491	24.678	

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
		Meningkatkan penyelenggaraan pelatihan pertanian	Persentase jumlah kegiatan yang mendukung penyelenggaraan pelatihan pertanian yang dirancang dan dianggarkan (%)	60	90	
		Mengembangkan kerjasama pelatihan pertanian	Jumlah kegiatan kerjasama pelatihan dan prosentase jumlah jenis pelatihan yang dirancang dan dilaksanakan (paket)	15	15	
10.3	Pemantapan sistem penyuluhan pertanian (Prioritas Nasional dan Bidang)	Menata dan menguatkan kelembagaan penyuluhan pertanian	Jumlah kelembagaan penyuluhan pertanian yang terbentuk sesuai UU No. 16 Tahun 2006 tentang SP3K(Bakorluh dan Bapeluh)	245	491	4.202,4
		Menumbuhkembangkan kelembagaan petani	jumlah kelembagaan petani (gapoktan)	28304	72000	
		Meningkatnya BPP model	Jumlah BPP model	336	458	
		Meningkatkan kualitas dan kuantitas ketenagaan penyuluh pertanian	Jumlah Ketenagaan penyuluhan pertanian yang ditingkatkan kualitas dan kuantitasnya(orang)	27.393	72.000	
		Meningkatkan mutu penyelenggaraan penyuluhan pertanian	Persentase jumlah kegiatan yang mendukung penyelenggaraan penyuluhan pertanian yang dirancang dan dianggarkan (%)	30	100	
11.	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Meningkatnya ketahanan pangan melalui pemberdayaan ketersediaan, distribusi, konsumsi dan keamanan pangan segar ditingkat masyarakat serta terkoordinasinya kebijakan ketahanan pangan.	<ul style="list-style-type: none"> - % Realisasi koordinasi analisis dan rumusan kebijakan ketahanan pangan; - % Realisasi pengembangan Desa Mandiri Pangan dalam mengurangi jumlah penduduk rawan pangan; - % Realisasi Penguatan kelembagaan distribusi pangan masyarakat dalam stabilisasi harga dan cadangan pangan masyarakat; - % Realisasi Gerakan percepatan penganeakeragaman konsumsi dan keamanan pangan segar dalam peningkatan konsumsi pangan beragam dan bergizi seimbang. 	90	100	3.184,3
				95	100	
				95	100	
				95	100	

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
11.1	Pengembangan ketersediaan dan penanganan rawan pangan. (Prioritas Nasional dan Bidang)	Meningkatnya pemantapan ketersediaan pangan dan penanganan rawan pangan.	· Jumlah Desa Mandiri Pangan yang dikembangkan. (desa)	1.750	5.00	982,6
			· Jumlah Lumbung Pangan yang dikembangkan. (Lumbung)	800	2.500	
			· Lokasi Rawan Pangan. Kab)	350	450	
			· Tersedianya Data dan Informasi tentang ketersediaan, cadangan dan daerah rawan pangan. (prop)	33	33	
			· Terlaksananya pemantauan dan pemantapan ketersediaan dan kerawanan pangan. (prop)	33	33	
11.2	Pengembangan Sistem Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan. (Prioritas Nasional dan Bidang)	Meningkatnya pemantapan distribusi dan harga pangan.	· Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM) (gap)	750	2.000	798,7
			· Tersedianya data dan informasi tentang distribusi, harga dan akses pangan. (prop)	33	33	
			· Terlaksananya pemantauan dan pemantapan distribusi, harga dan akses pangan. (prop)	33	33	
11.3	Pengembangan penganeekaragaman konsumsi pangan dan peningkatan keamanan pangan segar (Prioritas Nasional dan Bidang)	Meningkatnya pemantapan penganeekaragaman konsumsi pangan dan keamanan pangan	· Desa P2KP (Percepatan penganeekaragaman konsumsi pangan. (desa)	2.000	10.000	994,3
			· Promosi penganeekaragaman konsumsi pangan dan keamanan pangan	383 Pusat/ Kab	484 Pusat/ Prop/ Kab	
			· Penanganan keamanan pangan tingkat produsen dan konsumen	33	Prop 429 Prop/ Kab	
			· Terlaksananya pemantauan dan pemantapan penganeekaragaman konsumsi pangan dan keamanan pangan (prop)	33	33	

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
			· Tersedianya data dan informasi tentang pola konsumsi, pengankaragaman dan keamanan pangan.(prop)	33	33	
12.	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PENGKARANTINAAN PERTANIAN DAN PENGAWASAN KEAMANAN HAYATI	Meningkatnya efektifitas pelayanan karantina dan pengawasan keamanan hayati	Efektifitas pengendalian resiko masuk dan menyebarnya HPHK dan OPTK, serta pangan yang tidak sesuai standar keamanan pangan	50%	90%	2.754,7
			Efektifitas pelayanan ekspor komoditas pertanian dan produk tertentu.	90%	95%	
			Tingkat kepatuhan dan kepuasan pengguna jasa karantina pertanian	75%	95%	
12.1	Peningkatan Sistem Karantina Hewan (Prioritas Bidang)	Kebijakan teknis Karantina Hewan yang efektif dalam operasional pencegahan masuk, menyebar dan keluarnya HPHK.	Jml Rumusan Kebijakan teknis operasional karantina hewan yang dihasilkan/disempurnakan dan dapat berimplementasi (paket)	3	3	39,5
12.2	Peningkatan Sistem Karantina Tumbuhan (Prioritas Bidang)	Kebijakan teknis Karantina Tumbuhan yang efektif dalam operasional pencegahan masuk dan menyebarnya OPTK	Jml Rumusan Kebijakan teknis operasional karantina tumbuhan yang dihasilkan/disempurnakan dan dapat berimplementasi (paket)	3	3	39,5
12.3	Pengembangan Sistem Informasi dan Peningkatan sistem Pengawasan Keamanan Hayati (prioritas Bidang)	Kebijakan teknis pengawasan keamanan hayati yang efektif dalam operasional pengawasan keamanan hayati hewani dan Nabati; dan sistim informasi yang optimal dalam mendukung operasional Program Barantan	Jml Rumusan Kebijakan teknis operasional pengawasan keamanan hayati yang dihasilkan/disempurnakan dan dapat berimplementasi	2	2	70,0
			Tingkat kesiapan infrastruktur sistem informasi Barantan	40%	90%	
			Prosentase peningkatan akses informasi melalui jaringan ke pusat data Barantan oleh instansi terkait, pengguna jasa dan unit kerja lingkup Barantan	25%	25%	

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
12.4	Peningkatan Kualitas Pelayanan karantina Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati (Prioritas Nasional dan Bidang)	Pelayanan karantina pertanian dan pengawasan keamanan hayati yang efektif	Vol. dan frek. operasional tindakan karantina pertanian dan pengawasan keamanan hayati (sertifikasi karantina)	350 rb	450 rb	1.476,4
			Prosentase peningkatan indeks kesesuaian operasional tindakan karantina dan pengawasan terhadap kebijakan, standar, teknik dan metoda yang diberlakukan	10%	5%	
			Prosentase penolakan kiriman barang ekspor yang disertifikasi karantina pertanian	0%	0%	
			Peningkatan Indeks kepuasan dan kepatuhan pengguna jasa	15%	10%	
12.5	Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan laboratorium Uji Standar Karantina Pertanian (Prioritas Nasional dan Bidang)	Penyelenggaraan laboratorium yang berkualitas dalam mendukung efektifitas penilaian dan pengendalian resiko ditempat pemasukkan dan pengeluaran	Jml teknik dan metoda tindakan karantina dan pengawasan keamanan hayati yang diujicobakan dan dikembangkan	4	2	99,3
			Jumlah sampel lab. yang diperiksa sesuai ruang lingkup pengujian (Uji Standar, rujukan, konfirmasi dan profisiensi)	5000	8000	
			Jumlah laboratorium karantina yang diakreditasi	4	2	
TOTAL ALOKASI KEMENTERIAN PERTANIAN 2010-2014						67.248,3

K : Angka kumulatif 5 tahun (2010-2014)

**RENCANA TINDAK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH 2010-2014
PER KEMENTERIAN/LEMBAGA**

KEMENTERIAN/LEMBAGA: KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

No	PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
I	PROGRAM REVITALISASI DAN PENUMBUHAN BASIS INDUSTRI MANUFAKTUR	Tumbuh dan kuatnya basis industri manufaktur				5.069,7
1	Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Kimia Dasar	Tumbuh dan kuatnya struktur industri kimia dasar	Pada akhir tahun 2014, utilisasi kapasitas produksi pulih mencapai 100%	40%	100%	128,0
			Nilai tambah produk kimia dasar	20%	50%	
a.	Revitalisasi Industri Pupuk (Prioritas Nasional 5)	Fasilitasi pembangunan restrukturisasi 5 pabrik pupuk urea baru dan 5 pabrik pupuk NPK	Persen kemajuan	20%	100%	
b.	Pengembangan kluster industri berbasis migas, kondesat di Jawa Timur dan Kalimantan Timur (Prioritas Nasional 8)	Berkembangnya kluster industri berbasis migas dan petrokimia	2 Lokasi (Jawa Timur dan Kalimantan)	2	2	
			Entitas Kolaborasi Kluster	152	152	
2	Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Material Dasar dan Permesinan	Tumbuh dan kuat struktur industri material dasar permesinan	Pada akhir tahun 2014, utilisasi kapasitas produksi pulih mencapai 100%	40%	100%	1.831,9
			Meningkatnya jumlah populasi industri material dasar dan permesinan	9	37	
a.	Pengembangan Kluster Industri Material Dasar Permesinan	Berkembangnya kluster industri baja, listrik, TPT, mesin dan peralatan umum	Jumlah entitas kolaborasi kluster baja, listrik, TPT, mesin dan peralatan umum	123	528	
b.	Restrukturisasi Permesinan Industri	Terwujudnya peremajaan permesinan industri	Jumlah perusahaan yang menerima fasilitasi restrukturisasi	158	968 ^{K)}	
3	Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Bahan Bangunan dan Konstruksi	Tumbuh dan kuatnya struktur industri bahan bangunan dan konstruksi	Pada akhir tahun 2014, utilisasi kapasitas produksi pulih mencapai 100%	40%	100%	45,7
			Meningkatnya jumlah populasi industri bahan bangunan dan konstruksi	100%	105%	

KEMENTERIAN/LEMBAGA: KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

No	PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
a.	Pengembangan Klaster Industri Bahan Bangunan Konstruksi	Berkembangnya klaster industri semen dan industri keramik	Jumlah entitas kolaborasi klaster industri semen dan industri keramik	42	324	
4	Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Aneka dan Alat Pertanian	Tumbuh dan kuat struktur industri aneka dan alat pertanian	Pada akhir tahun 2014, utilisasi kapasitas produksi pulih mencapai 100%	40%	100%	23,0
			Nilai tambah produk industri aneka dan alat pertanian	100%	120%	
a.	Pengembangan Klaster Industri Alas Kaki	Berkembangnya klaster industri Alas Kaki	Jumlah entitas kolaborasi klaster	46	226	
II	PROGRAM REVITALISASI DAN PENUMBUHAN INDUSTRI AGRO	Tumbuh dan kuatnya basis industri manufaktur				2.532,1
1	Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Makanan	Tumbuhnya industri Makanan	Pada akhir tahun 2014, utilisasi kapasitas produksi pulih mencapai 85% sebagaimana sebelum krisis		85%	39,2
a.	Revitalisasi Industri Gula (Prioritas Nasional / P5)	- Terlaksananya restrukturisasi 3 perusahaan industri permesinan dalam negeri pendukung PG	Jumlah Pabrik	3	3	
		Fasilitasi pembangunan pabrik gula baru	Jumlah Pabrik	10	10	
b.	Pengembangan Klaster Industri Pengolahan Kelapa, Kakao, dan Gula	Berkembangnya klaster industri pengolahan kelapa, kakao, dan gula	Jumlah instansi dan perusahaan terkait industri kelapa, kakao, dan gula	160	160	
			Beroperasinya masing-masing 1 unit peralatan pengolah kelapa dan kakao	2	2	
2	Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Hasil Hutan dan Perkebunan	Tumbuh industri Hasil Hutan dan Perkebunan	Pada akhir tahun 2014, utilisasi kapasitas produksi pulih mencapai 85% sebagaimana sebelum krisis		85%	216,1
a.	Pengembangan klaster industri berbasis pertanian, oleochemical di Sumatera Utara, Kalimantan Timur, dan Riau (Prioritas Nasional Lainnya 2)	Fasilitasi Pengembangan Kawasan Industri Berbasis Sawit	Jumlah Perusahaan di 3 kawasan	40	100	
			kawasan		3	
			unit pilot project berbasis hasil samping / limbah sawit	1	2	

KEMENTERIAN/LEMBAGA: KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

No	PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
b.	Pengembangan Klaster Industri Karet, Kelapa Sawit, Furniture, dan Kertas	Berkembangnya klaster industri karet, kelapa sawit, furniture dan kertas	Jumlah instansi dan perusahaan terkait	140	145	
			Mesin peralatan dalam rangka meningkatkan mutu produk karet	2	2	
			Terminal Kayu & Rotan	2	9 ^{KJ}	
			Peralatan pensortir kertas bekas		4 ^{KJ}	
c.	Pengembangan Industri Bahan Bakar Nabati	Teknologi dan pemanfaatan bahan bakar nabati	Unit Peralatan	4	12 ^{KJ}	
3	Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Hasil Laut	Tumbuhnya industri Hasil Laut	Pada akhir tahun 2014, utilisasi kapasitas produksi pulih mencapai 75% sebagaimana sebelum krisis		75%	33,7
a.	Pengembangan Klaster Industri Pengolahan Ikan	Berkembangnya klaster industri pengolahan ikan	Jumlah instansi dan perusahaan terkait	50	50	
			Peralatan pengolahan ikan	1	5 ^{KJ}	
b.	Pengembangan Industri Berbasis Rumput Laut	Berkembangnya industri berbasis rumput laut	Wilayah	3	3	
4	Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Minuman dan Tembakau	Tumbuhnya industri Minuman dan Tembakau	Pada akhir tahun 2014, utilisasi kapasitas produksi pulih mencapai 87,5% sebagaimana sebelum krisis		87,50%	71,5
a.	Pengembangan Klaster Industri Pengolahan Tembakau, Buah, Kopi, dan Susu	Berkembangnya klaster industri pengolahan tembakau, buah, kopi, dan susu	Jumlah instansi dan perusahaan terkait	180	195	
			Peralatan peningkatan efisiensi pengolahan tembakau (tungku)	40	50	
			Mesin dan peralatan pengolahan buah	2	6 ^{KJ}	
			Mesin dan peralatan pengolahan kopi	2	18 ^{KJ}	
			Unit peralatan utk peningkatan mutu susu	5	5	
			Pabrik susu	0	1	

KEMENTERIAN/LEMBAGA: KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

No	PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
III	PROGRAM PENUMBUHAN INDUSTRI UNGGULAN BERBASIS IPTEK					640,0
1	Pengembangan Industri Alat Angkut (Kendaraan Bermotor, Perkapalan, Kedirgantaraan dan perkeretaapian.					127,7
	Pengembangan Klaster Industri Kendaraan Bermotor, Perkapalan, Kedirgantaraan, perkeretaapian	Berkembangnya klaster industri	Jumlah Perusahaan klaster industri kendaraan bermotor	100	200	
			Jumlah Perusahaan klaster industri perkapalan	75	122	
			Jumlah Perusahaan klaster industri kedirgantaraan	1	1	
			Jumlah Perusahaan klaster industri perkeretaapian	1	1	
2	Pengembangan Industri Elektronika dan Telematika	Tercapainya penguasaan dan pengembangan teknologi di Bidang Telematika secara berkesinambungan				107,9
	Pengembangan Klaster Industri Elektronika, Telekomunikasi, Komputer dan Peralatannya, Perangkat Lunak dan Konten Multimedia	Berkembangnya klaster industri	Jumlah Perusahaan dalam klaster industri elektronika	60	100	
			Jumlah Perusahaan dalam klaster industri telekomunikasi	3	7	
			Jumlah Perusahaan dalam klaster industri komputer	3	7	
			Jumlah Perusahaan dalam klaster industri konten multimedia	5	9	

KEMENTERIAN/LEMBAGA: KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

No	PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
IV	PROGRAM REVITALISASI DAN PENUMBUHAN IKM					1.900,0
1	Pengembangan Industri Kecil dan Menengah melalui pendekatan Klaster	Meningkatnya kemampuan desain, manajemen dan kreatifitas perajin	Terlaksananya implementasi kolaborasi dan kelembagaan klaster industri garam, fashion dan batik, batu mulia dan perhiasan, gerabah dan keramik hias, minyak atsiri dan makanan ringan yang semakin kuat. Terbentuknya jaringan kerjasama bisnis dan pengembangan Industri Kreatif	22 lokasi	39 lokasi	82,9
2	Penyebaran dan Pengembangan IKM di Kawasan Barat Indonesia	Terbinanya Pengembangan IKM di Kawasan Barat Indonesia	Meningkatnya Unit Usaha dan Tenaga Kerja Terbinanya Produk IKM Pangan, Sandang, KBB dan Kerajinan melalui pendekatan OVOP	16 Prov 32 Kab/ Kota 18 Kab/ Kota di 6 Pro-pinsi	16 Prov 32 Kab/ Kota 18 Kab/ Kota di 6 Pro-pinsi	775,8
3	Penyebaran dan Pengembangan IKM di Kawasan Tengah Indonesia	Terbinanya Pengembangan IKM di Kawasan Tengah Indonesia	Meningkatnya Unit Usaha dan Tenaga Kerja Terbinanya Produk IKM Pangan, Sandang, KBB dan Kerajinan melalui pendekatan OVOP	12 Prop 28 Kab /Kota 12 Kab/ Kota di 7 Pro-pinsi	12 Prop 28 Kab /Kota 12 Kab/ Kota di 7 Pro-pinsi	562,3
4	Penyebaran dan Pengembangan IKM di Kawasan Timur Indonesia	Terbinanya Pengembangan IKM di Kawasan Timur Indonesia	Meningkatnya Unit Usaha dan Tenaga Kerja Terbinanya Produk IKM Pangan, Sandang, KBB dan Kerajinan melalui pendekatan OVOP	5 Prop 8 Kab/ Kota	5 Prop 8 Kab/ Kota	247,7

KEMENTERIAN/LEMBAGA: KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

No	PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
V	PROGRAM PERWILAYAHAN INDUSTRI					259,0
1	Fasilitasi Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) (PN7)	Meningkatnya fasilitasi pengembangan kawasan zona industri di 5 kawasan ekonomi khusus (KEK)	Dokumen fasilitasi (AMDAL, engineering design/DED, dan kelembagaan) di 5 kawasan	5	5	32,40
VI	PROGRAM KERJASAMA INDUSTRI INTERNASIONAL					
1	Peningkatan Promosi Investasi dan Pemasaran Industri	Meningkatnya fasilitasi promosi investasi dan pemasaran industri	Jumlah paket promosi investasi (temubisnis, eksibisi, dll)	2	11	23,3
VII	PROGRAM KEBIJAKAN, IKLIM USAHA, MUTU, DAN INDUSTRI HIJAU					352,0
1	Pengembangan Standardisasi Industri dan Manajemen HAKI	Meningkatnya RSNI	Jumlah RSNI	100	500 ^{K)}	64,0
		Meningkatnya hasil litbang yang dipatenkan	Hasil litbang yang dipatenkan	5	25 ^{K)}	
2	Pengembangan Lingkungan Industri	Meningkatnya industri berwawasan lingkungan	Dokumen Kebijakan/Peraturan	1	5 ^{K)}	
			Tingkat pengurangan emisi CO2	2%/tahun	3%/tahun	
VIII	PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN					1.405,0
1	Peningkatan Pengelolaan Pelayanan Publik					21,7
a.	Reformasi Birokrasi di Bidang Pelayanan Umum (Prioritas Nasional 1)	Meningkatkan profesionalisme aparatur	Meningkatnya pelayanan kepada pemangku kepentingan dengan lebih cepat, singkat dan transparan		95%	
2	Pengembangan SDM Industri	Meningkatnya pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku SDM industri	Jumlah SDM industrial telah mengikuti diklat sebanyak 14.330 orang	1930 orang	14.330 orang ^{K)}	1.067,6
		Terwujudnya pendidikan untuk mendukung pengembangan kompetensi inti daerah	Jumlah penyelenggaraan pendidikan sesuai kompetensi inti daerah 9 unit	1 unit	2 unit	
		Penguatan kelembagaan pelatihan dan pendidikan	Peningkatan sarana dan prasarana lembaga diklat dan tata kelola manajemen yang baik	3 unit	6 unit	

KEMENTERIAN/LEMBAGA: KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

No	PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
3	Pengembangan Pendidikan Vokasi Industri	Terciptanya SDM industri terampil siap kerja	Jumlah lulusan SDM terampil sebanyak 7.150 orang	1100 orang	7150 orang ^{K)}	718,0
		Terciptanya ahli madya sesuai dengan kebutuhan industri	Jumlah lulusan ahli madya sebanyak 7.670 orang	1360 orang	7670 orang ^{K)}	
IX	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR					148,5
X	PROGRAM PENGAWASAN DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS APARATUR					131,3
TOTAL ALOKASI KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN 2010-2014						12.613,6

K : Angka kumulatif 5 tahun (2010-2014)

**RENCANA TINDAK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH 2010-2014
PER KEMENTERIAN/LEMBAGA**

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

NO	PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
I	PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA DESDM					3.524,5
II	PROGRAM PENINGKATAN SARANA PRASARANA APARATUR DESDM					288,1
III	PROGRAM PENGAWASAN DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS APARATUR NEGARA KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL					679,6
IV	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENYEDIAAN MINYAK DAN GAS BUMI					3.935,3
A.	KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL					2.657,5
1.	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Migas	Meningkatkan pembinaan, koordinasi dan dukungan teknis bagi Ditjen Migas secara optimal	Penggunaan Gas alam sebagai bahan bakar angkutan umum perkotaan di Palembang Surabaya dan Balikpapan	1 kajian	3 kajian / 21 SPBG ^{K)}	367,2
2	Pembinaan dan Penyelenggaraan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi	Peningkatan Kapasitas, kehandalan dan efisiensi infrastruktur sistem penyediaan bahan bakar dan bahan baku industri	Penambahan jaringan gas kota (kota/sambungan rumah)	3/16000	19/80000 ^{K)}	1.370,8
			Pembangunan kilang mini plant LPG	1 Kajian	2 kajian / 1 kilang miniplant LPG ^{K)}	382,0
			Pembangunan unit pengolahan Biofuel dalam rangka pembentukan DME di desa terpilih (desa)	8	40 ^{K)}	40,0
3	Pembinaan dan Penyelenggaraan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi	Meningkatnya pengelolaan, pengusahaan dan pembinaan usaha hulu minyak dan gas bumi dan CBM	Jumlah Kontrak Kerja Sama Minyak dan gas Bumi dan CBM yang ditawarkan dan ditandatangani	40 KKS Migas dan 10 KKS GMB ditawarkan	120 KKKS Migas dan 50 KKS GMB ditawarkan ^{K)}	117,4
			Pengolahan data seismik 2 D	2000km	10000 km ^{K)}	-
			Jumlah produksi migas dan CBM	1 lap	5 lap ^{K)}	58,0
	Jumlah investasi sub sektor minyak dan gas bumi dan CBM	554 Juta USD dan 150 Juta USD dari komitmen 3 tahun pertama	3047 Juta USD dan 830 Juta USD dari komitmen 3 tahun pertama ^{K)}		7,3	

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

NO	PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
			Jumlah kegiatan eksplorasi dalam upaya mencari cadangan migas baru	Survei Seismik 2D 14.700 km, Survei Seismik 3D 7.975 km ² , Pemboran 63 sumur	Survei Seismik 2D ^{K)} 36.790 km, Survei Seismik 3D 23545 km ² , Pemboran 299 sumur	59,9
			Jumlah pelaksanaan Survei Umum di Wilayah Terbuka	Data seismik 2D dan hasil pengolahannya di Lepas Pantai Sulawesi Selatan sepanjang 2000 km	Data seismik 2D dan hasil pengolahannya ^{K)} 10000 km	213,7
			Jumlah kegiatan penyiapan, promosi dan penawaran Wilayah Kerja Baru Migas	8 (delapan) event	50 event ^{K)}	28,7
			Menyiapkan Rencana Induk Petrokimia (DME)	1,8% dari produksi nasional	2% produksi nasional	2,2
			Prosentasi pemanfaatan gas bumi untuk kebutuhan dalam negeri.	50%	67%	6,2
4	Pembinaan Lingkungan, Keselamatan Operasi dan Usaha Penunjang Migas	Pembinaan dan Pengawasan Keandalan Infrastruktur, K3, Keselamatan Operasi, dan Lingkungan, serta Usaha Penunjang dan Teknis serta Standardisasi	Prosentase pengurangan volume pembakaran <i>gas flare</i> (%)	60	100	4,1
B.	KEGIATAN PRIORITAS BIDANG					829,3
1.	Penyiapan Kebijakan dan Peningkatan Kerja Sama Bilateral/Multilateral, Peningkatan Investasi Kegiatan Usaha Migas, dan Pemberdayaan Kapasitas Nasional	Pengembangan program, peningkatan penerimaan negara, investasi, kerjasama, dan kapasitas nasional bidang migas	Jumlah kejadian kelangkaan pasokan BBM dan LPG	3	12 ^{K)}	2,8
			· Jumlah laporan monitoring dan pengawasan pendistribusian BBM dan LPG	1 lap	5 lap ^{K)}	-
			Persentase terpenuhinya kebutuhan bahan baku pupuk dan petrokimia dalam negeri	100%	100%	9,0
			Peningkatan kapasitas infrastruktur	4 lap	20 lap ^{K)}	15,4

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

NO	PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
			Roadmap rasionalisasi subsidi BBM	2 lap	2 lap ^{K)}	1,0
			Jaminan pasokan gas untuk industri, transportasi, pembangkit listrik	70%	70%	5,5
			Jumlah realisasi Investasi subsektor migas (US\$)	15,415	88.021 ^{K)}	40,5
			Transparansi dan akuntabilitas pencatatan pendapatan negara	100%	100%	75,3
			Ratio tenaga kerja asing dengan tenaga kerja nasional	3 lap	15 lap ^{K)}	13,9
			Persentase pemanfaatan barang dan jasa dalam negeri pada usaha minyak dan gas bumi	55	65	16,1
			Jumlah Pelaksanaan Pertemuan Kerjasama Dalam Negeri, Bilateral, Regional, dan Multilateral, Minyak dan Gas Bumi	3	20 ^{K)}	52,1
2.	Pembinaan dan Penyelenggaraan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi	Meningkatnya pengelolaan, pengusahaan dan pembinaan usaha hulu minyak dan gas bumi dan CBM	Jumlah Laporan Potensi Cadangan Minyak dan Gas Bumi dan CBM	1 lap	5 lap ^{K)}	3,5
			Jumlah Sumber Daya Minyak dan Gas Bumi dan CBM	1 lap	5 lap ^{K)}	6,2
			Jumlah persetujuan Plan of Development (POD) I	2	37 ^{K)}	6,6
			Jumlah persetujuan harga gas bumi	15	78 ^{K)}	7,7
			Jumlah persetujuan amandemen dan atau perpanjangan kontrak	3	15 ^{K)}	2,0
			Jumlah persetujuan Participating Interest (PI) kepada BUMD atau perusahaan nasional terkait dengan POD I.	2	21 ^{K)}	2,4
			Prosentase pengembangan dan pemanfaatan gas bumi.	97%	99%	4,5
			Prosentase penyerahan data minyak dan gas bumi dan CBM.	90%	95%	4,4
			Prosentase pengelolaan data dan informasi bidang eksplorasi dan eksploitasi migas.	90%	95%	5,8

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

NO	PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
			Prosentase perkembangan penanganan tumpang tindih lahan.	20%	60%	1,3
			Prosentase Pengelolaan, Pembahasan dan Evaluasi Laporan Kegiatan KKKS dari BPMIGAS.	100%	100%	5,5
3.	Pembinaan dan Penyelenggaraan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi	Peningkatan Kapasitas, kehandalan dan efisiensi infrastruktur sistem penyediaan bahan bakar dan bahan baku industri	Jumlah laporan pengembangan kapasitas dalam negeri (infrastruktur cadangan strategis minyak bumi dan BBM)	1 lap	5 lap ^{K)}	7,5
			Jumlah laporan pemutakhiran kapasitas penyimpanan dalam negeri (peta dan data fasilitas pengangkutan dan penyimpanan migas)	2 lap	10 lap ^{K)}	2,8
			Jumlah laporan kapasitas pengangkutan (pemetaan kapasitas infrastruktur dan kebutuhan fasilitas pendistribusian bahan bakar minyak dan gas)	1 lap	5 lap ^{K)}	2,8
			Jumlah laporan produksi (monitoring dan evaluasi kegiatan operasi kilang migas)	1 lap	5 lap ^{K)}	3,6
			Pemenuhan BBM dalam negeri untuk Indonesia bagian timur	73,36%	73,60%	15,4
			Laporan penggunaan BBN dalam pemakaian Bahan Bakar total	6 lap	30 lap ^{K)}	115,5
			Jumlah laporan Desa Mandiri Energi berbasis BBN (pengawasan, pembinaan dan pengembangan DME)	2 lap	10 lap ^{K)}	16,6
			Jumlah laporan penjualan hasil olahan migas	3 lap	15 lap ^{K)}	15,6
			Jumlah laporan kelangkaan pendistribusian LPG 3 kg (PSO) ke seluruh Indonesia	3 lap	9 lap ^{K)}	11,1
			Jumlah laporan penambahan kapasitas Depot	4 lap	20 lap ^{K)}	12,7
			Jumlah laporan Indeks kepuasan konsumen bahan bakar	4 lap	20 lap ^{K)}	35,5
			Jumlah laporan usaha pengolahan minyak bumi	1 lap	5 lap ^{K)}	3,6

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

NO	PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
			Jumlah laporan usaha pengolahan gas bumi	1 lap	5 lap ^{K)}	3,6
			Jumlah laporan usaha pengolahan Hasil Olahan	1 lap	5 lap ^{K)}	3,6
			Jumlah laporan usaha pengangkutan	1 lap	5 lap ^{K)}	3,6
			Jumlah laporan usaha pengangkutan gas bumi melalui pipa	1 lap	5 lap ^{K)}	6,6
			Jumlah laporan usaha penyimpanan	1 lap	5 lap ^{K)}	2,2
			Jumlah laporan usaha niaga minyak bumi, Bahan Bakar Minyak, LPG, LNG, CNG serta hasil Olahan	1 lap	5 lap ^{K)}	3,4
			Jumlah usaha niaga gas bumi melalui pipa	1 lap	5 lap ^{K)}	3,4
			Jumlah rekomendasi pemantauan realisasi ekspor minyak dan evaluasi stok minyak mentah	2 lap	10 lap ^{K)}	8,5
			Jumlah pelanggaran regulasi usaha hilir (Sosialisasi dan menyusun peraturan, pameran)	1 pkt	5 pkt ^{K)}	10,6
			Laporan prosentase penghematan BBM Bersubsidi	2 lap	10 lap ^{K)}	15,7
			Laporan prosentase pengalihan pemakaian minyak tanah ke LPG	1 lap	5 lap ^{K)}	20,1
4.	Pembinaan Lindungan Lingkungan, Keselamatan Operasi dan Usaha Penunjang Migas	Pembinaan dan Pengawasan Kehandalan Infrastruktur, K3, Keselamatan Operasi, dan Lingkungan, serta Usaha Penunjang dan Teknis serta Standardisasi	Prosentase pengurangan volume pembuangan air limbah ke lingkungan (%)	20	75	35,1
			Prosentase pengurangan volume limbah pada sumbernya (%)	20	75	6,5
			Prosentase peningkatan jumlah penggunaan bahan, bahan kimia dan lumpur bor yang ramah lingkungan	50	100	2,8
			Prosentase Penurunan Jumlah tingkat kegagalan operasi infrastruktur kegiatan usaha hilir Migas	Pada 50 BU	Pada 75 BU	26,6
			Prosentase penurunan jumlah tingkat kecelakaan kerja operasi kegiatan usaha hulu migas	70%	80%	22,5
			Prosentase peningkatan pemahaman peraturan keselamatan operasi kegiatan usaha migas (%)	20	100	6,9

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

NO	PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
			Prosentase peningkatan penggunaan sistem basis data usaha penunjang migas dalam operasi internal (%)	0	5	4,5
			Jumlah tersedianya Rancangan Standar Nasional Indonesia untuk kegiatan usaha migas (buah)	5	25 ^{K)}	29,9
			Jumlah tersedianya Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (RSKKN) untuk kegiatan usaha migas	3	15 ^{K)}	29,9
			Prosentase tingkat kegagalan operasi kegiatanhilir migas (%)	30%	24%	13,5
			Prosentase penurunan angka kecelakaan kerja kegiatan usaha migas	20%	100%	1,6
			Prosentase peningkatan kemampuan nasional dalam merancang dan merakit instalasi peralatan migas	60%	80%	43,8
C.	KEGIATAN PENUNJANG					448,5
1.	Kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Ditjen Migas	Meningkatkan pembinaan, koordinasi dan dukungan teknis bagi Ditjen Migas secara optimal	Prosentase peningkatan pengunjung website	10%	10%	19,4
			Jumlah laporan RKAKL yang disusun berdasarkan anggaran berbasis kinerja dalam kerangka pengeluaran berjangka menengah	1	5	3,7
			Jumlah buku LAKIP Ditjen Migas	1	5	3,3
			Jumlah draft Peraturan Perundang-undangan migas yang telah diselesaikan	15	60	5,7
			Jumlah draft Kontrak Kerjasama Migas dan Gas Metana Batubara yang disusun	40 Kontrak Migas dan 10 Kontrak CBM	210 Kontrak Migas dan 50 Kontrak CBM	8,4
			Jumlah penyidikan pelanggaran pidana bidang migas	17	97	4,0
			Transformasi dan konsolidasi BUMN bidang energi dimulai dari PLN dan Pertamina yang selesai selambat-lambatnya 2010 (SDM)	1 rumusan kebijakan	1 rumusan kebijakan	7,6

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

NO	PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
			Presentase penempatan pegawai dalam jabatan sesuai dengan kompetensi personil	70%	100%	148,9
			Presentase pemenuhan pelayanan pimpinan	100%	100%	34,4
			Presentase sarana dan prasarana yang berada dalam kondisi baik (layak pakai)	100%	100%	20,3
			Presentase pencapaian realisasi anggaran	100%	100%	12,0
			Hasil Opini Pemeriksaan BPK	WDP	WTP	3,7
			Presentase target realisasi PNBP Migas	100%	100%	7,4
			Presentase BMN Ditjen Migas yang tercatat	100%	100%	32,2
			Presentase BMN Migas yang dihapuskan	100%	100%	6,4
			Presentase pemenuhan gaji pegawai	100%	100%	130,9
V	PROGRAM PENGELOLAAN LISTRIK DAN PEMANFAATAN ENERGI					55.922,4
A.	KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL					54.873,6
1.	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi	Pelayanan yang optimal baik administratif maupun teknis untuk mendukung pelaksanaan tupoksi Ditjen LPE	Jumlah aturan pendukung peraturan perundang-undangan bidang listrik dan pemanfaatan energi	3 PP, 3 RPP	6 PP, 3 RPP, 21 peraturan lainnya ^{K)}	50,0
2.	Penyusunan Kebijakan dan Program Serta Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Ketenagalistrikan	Terpenuhinya kebutuhan tenaga listrik dan meningkatnya ratio elektrifikasi.	Jumlah Kapasitas pembangkit (MW)	22	60 ^{K)}	595,0
			Transmisi (kms)	3.381	19.462 ^{K)}	16.094,7
			Gardu Induk (MVA)	2.159	12.858 ^{K)}	9.631,0
			Panjang jaringan dan gardu distribusi (kms/MVA)/satker Lisdes	18004/1266	95551/7109 ^{K)}	27.483,0
3.	Penyediaan dan Pengelolaan Energi Baru Terbarukan dan Pelaksanaan Konservasi Energi	Terwujudnya penyediaan dan pengelolaan energi baru terbarukan dan konservasi energi	Kapasitas terpasang pembangkit listrik dari sumber energi mikro hidro (MW)	1,53	46 ^{K)}	69,0
			Kapasitas terpasang pembangkit listrik dari sumber energi surya (MWp)	3,55	102 ^{K)}	ditambah DAK 492,6
			Kapasitas terpasang pembangkit listrik dari sumber energi angin (MW)	0,00	22 ^{K)}	ditambah DAK -
						dari DAK

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

NO	PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
			Kapasitas pembangkit dari sumber energi biomassa (MW)	0	0,40 ^{K)}	dari DAK
			Jumlah desa mandiri energi (desa)	50	250 ^{K)}	300,0
			Jumlah studi kelayakan dan pilot project energi laut (studi & pilot)	1 studi	5 studi & 10 pilot ^{K)}	30,0
			Jumlah gedung dan industri yang menerima layanan audit energi (objek)	185	1.003 ^{K)}	115,4
			Jumlah regulasi di bidang energi baru terbarukan (buah)	4	10 ^{K)}	9,3
			Jumlah regulasi di bidang efisiensi energi (buah)	3	12 ^{K)}	3,8
B.	KEGIATAN PRIORITAS BIDANG				^{K)}	685,8
1	Pembinaan, Pengaturan dan Pengawasan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dan pengembangan usaha penyediaan tenaga listrik	Meningkatnya pelayanan usaha penyediaan tenaga listrik, meningkatnya pengembangan usaha penyediaan tenaga listrik, dan meningkatnya mutu usaha penyediaan tenaga listrik	Jumlah rekomendasi pembinaan dan pengawasan kepada PKUK dan PIUKU (buah)	10	60 ^{K)}	4,5
			Rata-rata pelayanan permohonan daerah usaha atau ekspansi daerah usaha (hari)	30	25	2,4
			Jumlah konsep persetujuan harga beli tenaga listrik yang disampaikan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (buah)	24	120 ^{K)}	2,5
			Rata-rata waktu penyelesaian evaluasi permohonan persetujuan harga beli tenaga listrik (hari)	20	20	5,0
			Jumlah penetapan/penyesuaian harga jual tenaga listrik oleh Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk Kepentingan Umum (IUKU) (buah)	4	20 ^{K)}	3,8
			Rata-rata waktu penetapan besar susut jaringan PT PLN (Persero) setiap triwulan (hari)	15	15	2,7
			Jumlah perhitungan biaya pokok penyediaan tenaga listrik PT PLN (Persero) (buah)	10	50 ^{K)}	2,5

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

NO	PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
			Jumlah perhitungan subsidi listrik PT PLN (Persero) (buah)	10	50 ^{K)}	3,3
			Jumlah pelaksanaan fasilitasi perselisihan konsumen listrik dengan penyedia listrik (buah)	80	340 ^{K)}	3,0
			Jumlah pelaksanaan sosialisasi peningkatan usaha (kali)	6	28 ^{K)}	6,3
			Prosentase penyempurnaan dan penyederhanaan aturan usaha(%)	20	30	3,0
			Prosentase penyelesaian permohonan daerah usaha dan ekspansinya (%)	100	100	6,0
			Prosentase izin usaha yang diterbitkan (%)	20	25	6,1
			Prosentase pengawasan terhadap pelaksanaan izin usaha yang diterbitkan	20	25	3,8
			Prosentase persetujuan dan penandasahan Rencana Impor Barang Modal (%)	20	25	4,1
			Prosentase pengawasan terhadap pelaksanaan Impor Barang Modal	20	25	4,1
			Tingkat kepuasan konsumen terhadap pelayanan pengaduan (indeks)	100	100	3,8
			Prosentase penyelesaian pengaduan konsumen listrik (%)	100	100	2,5
			Prosentase pencapaian indikator Tingkat Mutu Pelayanan tenaga listrik (%)	25	80	8,3
			Prosentase penyelesaian fasilitasi perselisihan (%)	90	100	2,7
			Tingkat pemahaman sosialisasi peningkatan usaha (indeks)	70	90	2,8

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

NO	PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
2	Penyusunan Kebijakan dan Program Serta Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Ketenagalistrikan	Terpenuhinya kebutuhan tenaga listrik dan meningkatnya ratio elektrifikasi.	Jumlah kebijakan investasi listrik (laporan)	6	34 ^{K)}	30,8
			Jumlah Perencanaan dan Program Ketenagalistrikan (Laporan)	7	36 ^{K)}	172,4
3	Penyediaan dan Pengelolaan Energi Baru Terbarukan dan Pelaksanaan Konservasi Energi	Terwujudnya penyediaan dan pengelolaan energi baru terbarukan dan konservasi energi	Tingkat kepedulian masyarakat terhadap pemanfaatan sumber energi baru terbarukan (indeks)	50	50	125,0
			Jumlah peserta bimbingan teknis energi baru terbarukan (orang)	180	900 ^{K)}	5,0
			Jumlah fasilitas energi baru terbarukan yang sudah dikembangkan secara komersial (unit)	10	50 ^{K)}	5,0
			Jumlah jenis peralatan pemanfaat tenaga listrik yang menerapkan labelisasi hemat energi (buah)	3	11 ^{K)}	1,8
			Jumlah manager energi dan auditor energi yang bersertifikat (orang)	-	350 ^{K)}	2,1
			Jumlah peserta bimbingan teknis konservasi energi	170	850 ^{K)}	5,0
			Tingkat kepedulian masyarakat terhadap pelaksanaan konservasi energi (indeks)	50	70	3,2
			Jumlah pemanfaatan biomassa untuk rumah tangga (laporan)	1	5 ^{K)}	17,0
4	Pembinaan keselamatan dan lindungan lingkungan ketenagalistrikan serta usaha jasa penunjang tenaga listrik	Meningkatnya pembinaan keselamatan dan lindungan lingkungan ketenagalistrikan	Jumlah perumusan SNI	45	225 ^{K)}	17,5
			Jumlah pemberlakuan SNI sebagai standard wajib	10	50 ^{K)}	1,0
			Jumlah sertifikasi peralatan tenaga listrik dan pemanfaatan tenaga listrik	40	250 ^{K)}	3,1
			Jumlah lokasi pengawasan dan sosialisasi SNI	8	40 ^{K)}	1,3
			Jumlah lokasi sidang dalam rangka kerjasama internasional standarisasi	8	40 ^{K)}	1,8
			Jumlah pembangkit tenaga listrik yang bersertifikat	25	145 ^{K)}	5,2
			Jumlah instalasi transmisi dan distribusi yang bersertifikat	75	395 ^{K)}	4,3

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

NO	PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
			Jumlah instalasi pemanfaatan tenaga listrik yang bersertifikat	300	1.500 ^{K)}	5,4
			Jumlah sosialisasi regulasi teknik dan lingkungan ketenagalistrikan	2	16 ^{K)}	6,4
			Instalasi penyediaan tenaga listrik dan instalasi pemanfaatan tenaga listrik yang aman, andal, dan akrab lingkungan	50%	75%	8,3
			Tingkat mutu dan keandalan pembangkit, transmisi, dan distribusi tenaga listrik	70%	80%	4,8
			Jumlah Badan Usaha Penunjang Tenaga Listrik yang tersertifikasi di bidangnya	5	25 ^{K)}	3,5
			Jumlah Lembaga Sertifikasi Produk Yang Terakreditasi	2	35 ^{K)}	12,3
			Jumlah IMJ (Ijin Menggunakan Jaringan) Badan Usaha Pemanfaat jaringan tenaga listrik untuk kepentingan telematika	3	78 ^{K)}	20,8
			Tingkat Tertib administrasi dan teknis di bidang sertifikasi laik operasi instalasi tenaga listrik	60%	80%	1,9
			Tingkat tertib administrasi dan teknis di bidang sertifikasi produk peralatan dan pemanfaat tenaga listrik	60%	80%	2,3
			Jumlah Lembaga Inspeksi Teknik yang terakreditasi	2	67 ^{K)}	26,8
			Penggunaan Barang dan Jasa Produksi dalam negeri dalam pembangunan sektor ketenagalistrikan	60%	80%	4,1
			Jumlah standar kompetensi ketenagalistrikan (buah)	350	1.750 ^{K)}	12,6
			Jumlah penetapan dan pemberlakuan standar kompetensi (buah)	3	15 ^{K)}	2,5
			Jumlah sertifikat kompetensi (buah)	560	3.100 ^{K)}	4,0

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

NO	PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
			Jumlah sosialisasi tentang standar kompetensi ketenagalistrikan (buah)	3	17 ^{K)}	2,0
			Jumlah rekomendasi Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing	40	250 ^{K)}	2,8
			Jumlah Tenaga Teknik yang tersertifikasi (orang)	2180	12.040 ^{K)}	2,5
			Jumlah updating faktor emisi Clean Development Mechanism (CDM) sistem grid koneksi ketenagalistrikan	1 grid koneksi	25 grid koneksi ^{K)}	33,9
			Jumlah data analisis medan magnet dan medan listrik di bawah jaringan SUTET 500 KV serta kesehatan masyarakat yang terpajan medan magnet dan medan listrik di bawah jaringan SUTET	400 responden,	2000 responden, ^{K)}	4,0
			Jumlah fasilitasi penyelesaian kasus-kasus lingkungan ketenagalistrikan (SUTET 500 kV, Pembangkitan dll)	10 kasus	72 kasus ^{K)}	5,0
			Jumlah pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Community Development Sektor Ketenagalistrikan	13 unit usaha	95 unit ^{K)}	5,9
			Jumlah pembinaan dan pengawasan teknis bidang lingkungan sektor ketenagalistrikan baik pada ijin usaha (AMDAL dan atau UKL/UPL) maupun kelaikan teknis bidang lingkungan ketenagalistrikan	13 sektor	95 sektor ^{K)}	4,8
			Jumlah mitigasi teknologi strategi penurunan emisi CO2 di sektor ketenagalistrikan	1 teknologi	25 teknologi ^{K)}	25,0
C.	KEGIATAN PENUNJANG					362,9
1.	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya di Direktorat Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi	Pelayanan yang optimal baik administratif maupun teknis untuk mendukung pelaksanaan tupoksi Ditjen LPE	Jumlah SOP pelayanan administratif dan teknis	50 SOP	250 SOP	50,0
			Jumlah kumulatif aset pembangunan ketenagalistrikan dan pemanfaatan energi yang dapat dilaporkan sebagai barang milik negara	3 Triliun	45 triliun	100,0
			Jumlah kasus administratif kepegawaian	5 Kasus	25 kasus	30,0

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

NO	PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
			Jumlah laporan perencanaan program dan kegiatan bidang listrik dan pemanfaatan energi	5 Laporan	25 laporan	85,0
			Pemutakhiran sistem dan jaringan informasi	4 Paket	20 paket	97,9
VI	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGUSAHAAN MINERAL. BATUBARA. PANAS BUMI DAN AIR TANAH					2.434,4
A.	KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL					364,2
1.	Pembinaan dan Pengusahaan Panas Bumi dan Air Tanah	Tercapainya target kontribusi PLTP pada program 10.000 MW tahap II	Jumlah kapasitas PLTP terpasang sebesar 5795 MW di tahun 2014	1.261	5.795 ^{K)}	296,4
		Tersedianya regulasi bidang panas bumi dan air tanah	Jumlah regulasi panas bumi dan air tanah	20	50 ^{K)}	25,0
		Tercapainya target produksi listrik panas bumi	Jumlah PNBP dari sektor panas bumi (ribu USD)	63.961	188.867 ^{K)}	-
			- Penyusunan klasifikasi data potensi dan cadangan panas bumi untuk ketenagalistrikan dan pemanfaatan langsung energi panas bumi	2 keg	10 keg ^{K)}	13,9
			Jumlah lokasi penugasan survei pendahuluan untuk meningkatkan status potensi	6	^{K)}	-
		Tersedianya informasi investasi produksi industri minuman berbahan baku air tanah dari 33 provinsi	- Perencanaan produksi listrik dari panas bumi (MWh)	9.712.224	45.061.920 ^{K)}	22,7
2.	Pembinaan Ketechnikan Lindungan Lingkungan dan Usaha Penunjang Mineral. Batubara. Panas Bumi dan Air Tanah	Meningkatnya kompetensi KTT dan penanggung jawab kegiatan di lapangan pada IUP (KP)	Prosentasi penjaminan reklamasi dan pasca tambang pada kegiatan usaha pertambangan	100	100	3,6
			Kualitas baku mutu air limbah tambang pada kegiatan usaha pertambangan	100%	100%	2,7
B.	KEGIATAN PRIORITAS BIDANG					1.224,6
1.	Kegiatan Penyusunan Kebijakan dan Program serta Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Mineral. Batubara dan Panas Bumi	Tersedianya pelayanan data dan informasi Mineral, Batubara, Panas Bumi dan air tanah secara lengkap, aktual dan on line;	- Jumlah Pedoman/NSPK untuk aplikasi pengelolaan kegiatan pertambangan di Provinsi/Kabupaten/ Kota	8	35 ^{K)}	22,6

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

NO	PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
		Terinventarisirnya potensi PNBP dari KP/IUP seluruh Indonesia; Tersedianya data on line PNBP, antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah; Terlaksananya dekonsentrasi penagihan PNBP KP terbitan daerah; Tersedianya data mineral, batubara, panas bumi dan air tanah secara on line antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah; Tersosialisasinya UU Nomor 4 Tahun 2009; Tumbuhnya perijinan IUP; Tersedianya data dan informasi peluang investasi pembangunan smelter mineral logam utama (Ni, Au, Cu, Al, Sn); Tersedianya data dan informasi infrastruktur penunjang pelabuhan angkut batubara; Meningkatnya pemanfaatan briket batubara; Terlaksananya pengembangan; Meningkatnya pemahaman aparat daerah dan pelaku tambang rakyat dalam pengelolaan/ pemahaman Pedoman Teknis Pertambangan Rakyat pertambangan skala kecil;	- verifikasi/ inventarisasi/ rekonsiliasi/ sosialisasi kajian PNBP bidang pertambangan mineral, batubara dan panas bumi	7 keg	35 keg ^{K)}	115,2
			- Pelaksanaan otonomi daerah dalam pengelolaan kegiatan pertambangan di pemerintah provinsi/ kabupaten/kota	50 kab/kota	90 kab/kota ^{K)}	44,5
			- Penyusunan kajian investasi di sektor mineral, batubara dan panas bumi	8 keg	40 keg ^{K)}	45,0
			- Pelaksanaan pengelolaan kerja sama sub sektor mineral, batubara dan panas bumi	8 keg	48 keg ^{K)}	17,5
			- Penyusunan perumusan sistem prosedur teknis (inventarisasi, evaluasi, pemantauan, pembinaan aparat, identifikasi) perencanaan produksi	12 keg	60 keg ^{K)}	42,1
			Jumlah rencana pasokan batubara untuk kebutuhan dalam negeri (juta ton)	75	110 ^{K)}	7,0
			-Pengembangan pemanfaatan briket batubara, pengembangan daerah percontohan dan optimalisasi nilai tambah mineral dan batubara	3 keg	15 keg ^{K)}	74,4
			Jumlah penetapan wilayah usaha pertambangan (WUP), Wilayah pencadangan negara (WPN), dan Wilayah ijin usaha Pertambangan (WIUP) mineral dan batubara	3	15 keg ^{K)}	64,8
			Penetapan Wilayah Kerja Pertambangan (WKP) panas bumi	6	30 ^{K)}	3,3
			Jumlah buku data informasi mineral, batubara, panas bumi dan air tanah	1	5 ^{K)}	6,2
		Evaluasi Penggunaan Lahan Pertambangan	1	5 ^{K)}	5,0	

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

NO	PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
2.	Pembinaan dan Pengusahaan Mineral dan Batubara	Terciptanya optimalisasi penerimaan negara khususnya dari sektor batubara diperlukan pengumpulan dan evaluasi data biaya penjualan dalam kaitannya dengan penetapan DHPB secara	Jumlah TKA yang sesuai dengan standar kompetensi	6 wilayah dan 20 Perusahaan	8 wilayah dan 30 Perusahaan	-
			- Evaluasi dan verifikasi ketenagakerjaan sub sector mineral, batubara dan panas bumi	2 keg	6 keg ^{K)}	26,2
		Terlaksananya program dalam rangka meningkatkan investasi dan penerimaan negara dari sektor pertambangan secara berkelanjutan	Jumlah evaluasi pelaksanaan <i>Community Development</i>	25 Wilayah dan 20 Perusahaan KK dan PKP2B	25 wilayah dan 30 Perusahaan KK dan PKP2B	-
			- Evaluasi pelaksanaan <i>Community Development</i>	4 keg	20 keg ^{K)}	30,3
		Terciptanya penguatan kelembagaan daerah dalam sektor pertambangan dalam rangka OTDA dan dekosentrasi, serta terlaksananya kertasama	Peningkatan Nilai Tambah Bahan Galian Tambang	6 Wilayah	34 wilayah ^{K)}	-
			- Kajian (verifikasi dan inventarisasi) nilai tambah bahan galian tambang	6 Wilayah	34 wilayah ^{K)}	5,5
		Terciptanya pengembangan batubara sebagai energi alternatif utama melalui peningkatan produksi, pemanfaatan dalam negeri, dll.	Jumlah terselesaikannya konflik tumpang tindih dalam wilayah PKP2B	10 Wilayah	52 wilayah ^{K)}	-
			- Terselesaikannya konflik tumpang tindih dalam wilayah PKP2B	10 Wilayah	52 wilayah ^{K)}	5,2
		Terciptanya bank data mineral dan batubara nasional yang komprehensif, sehingga dapat	Jumlah penagihan PNBPN bidang Minerba	34%	30%	-
			- Terlaksananya penagihan PNBPN bidang Minerba	34%	30%	7,5
		Terciptanya pengusahaan mineral dan batubara yang kondusif	Persentase Realisasi Masterlist (pembelian dalam negeri dan impor) perusahaan KK dan PKP2B	33%:67%	42%:58%	-
			- Evaluasi masterlist	1 lap	5 lap ^{K)}	20,9
		Terciptanya penanggulangan PETI melalui program verifikasi terhadap perusahaan tambang	Jumlah Divestasi dan Perubahan Saham Bidang Mineral dan Batubara	33 Perusahaan	^{K)}	-
			- Evaluasi Divestasi dan Perubahan Saham Bidang Mineral dan Batubara (pembuatan buku susunan	1 keg	5 keg ^{K)}	10,3
		Terlaksananya inventarisasi batubara mutu rendah dan cara peningkatan nilai tambahnya	Persentase penggunaan kandungan lokal (local content) untuk menunjang pembangunan berkelanjutan	Naik 2 %		-

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

NO	PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
			- Penyusunan peningkatan penggunaan kandungan lokal (local content) untuk menunjang pembangunan berkelanjutan	1 pkt	5 paket ^{K)}	17,2
	Terlaksananya promosi kepentingan nasional dalam rangka pelaksanaan dan pembinaan usaha jasa mineral dan batubara dan peningkatan local content		- Sistem yang terintegrasi, mudah digunakan, handal dan pelayanan publik yang lebih baik.	6 sistem	6 sistem ^{K)}	-
			- Pembuatan Sistem yang terintegrasi, mudah digunakan, handal dan pelayanan publik yang lebih baik	6 sistem	6 sistem ^{K)}	3,3
			Jumlah Perusahaan yang diawasi kegiatan usaha pertambangannya	42 KK dan 76 PKP2B	210 KK dan 380 PKP2PB ^{K)}	-
			- Pelaksanaan pengawasan Perusahaan terhadap perusahaan tambang	42 KK dan 76 PKP2B	210 KK dan 380 PKP2PB ^{K)}	12,5
			Tersusunnya laporan akuntabilitas Kinerja DBM	1 LAKIP	5 LAKIP ^{K)}	2,3
			Jumlah perusahaan KK dan PKP2B Eksplorasi dan FS yang dievaluasi RKAB nya	42 KK dan 76 PKP2B	210 KK dan 380 PKP2PB ^{K)}	-
			- Evaluasi terhadap perusahaan KK dan PKP2B Eksplorasi dan FS yang dievaluasi RKAB nya	42 KK dan 76 PKP2B	210 KK dan 380 PKP2PB ^{K)}	5,0
			Jumlah laporan kegiatan perusahaan KK dan PKP2B yang dievaluasi	20 provinsi dan 30 perusahaan KK/ PKP2B	20 provinsi dan 30 perusahaan KK/ PKP2B ^{K)}	-
			- Penyusunan laporan kegiatan perusahaan KK dan PKP2B yang dievaluasi	20 provinsi dan 30 perusahaan KK/ PKP2B	20 provinsi dan 30 perusahaan KK/ PKP2B ^{K)}	10,0
			Jumlah Neraca cadangan, sumberdaya dan cadangan Izin usaha, KK dan PKP2B yang dievaluasi	5 cadangan Izin Usaha dan 20 KK	5 cadangan Izin Usaha dan 20 KK ^{K)}	-
		- Evaluasi terhadap Neraca cadangan, sumberdaya dan cadangan Izin usaha, KK dan PKP2B yang dievaluasi	5 cadangan Izin Usaha dan 20 KK	5 cadangan Izin Usaha dan 20 KK ^{K)}	13,2	

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

NO	PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
			Jumlah Kebijakan eksplorasi perusahaan induk (<i>principal</i>) dari perusahaan tambang yang beroperasi di Indonesia yang dievaluasi	40 KK/20 PKP2B	40 KK/20 PKP2B ^{K)}	-
			- Penyusunan Kebijakan eksplorasi perusahaan induk (<i>principal</i>) dari perusahaan tambang yang beroperasi di Indonesia yang dievaluasi	40 KK/20 PKP2B	40 KK/20 PKP2B ^{K)}	12,5
			Jumlah laporan rencana kerja dalam amandemen kontrak/perjanjian Minerba yang dievaluasi	42 KK dan 76 PKP2B	^{K)}	-
			- Penyusunan laporan rencana kerja dalam amandemen kontrak/perjanjian Minerba yang dievaluasi	42 KK dan 76 PKP2B	42 KK dan 76 PKP2B ^{K)}	3,9
			Jumlah Pengadaan alat-alat software, sistem pengawasan eksplorasi dan penyampaian laporan kegiatan eksplorasi perusahaan	1 software, 2 sistem dan 5 unit	5 software, 10 sistem dan 25 unit ^{K)}	-
			- Terencananya Pengadaan alat-alat software, sistem pengawasan eksplorasi dan penyampaian laporan kegiatan eksplorasi perusahaan	1 software, 2 sistem dan 5 unit	5 software, 10 sistem dan 25 unit ^{K)}	26,5
			Jumlah seminar prospek eksplorasi Sumber Daya Mineral batubara di Indonesia	1 provinsi	5 propinsi ^{K)}	-
			- Pelaksanaan seminar prospek eksplorasi Sumber Daya Mineral batubara di Indonesia	1 provinsi	5 propinsi ^{K)}	5,5
			Jumlah Pedoman untuk perusahaan KK/PKP2B dan Kajian tahap Produksi Mineral	1 Pedoman dan 10 KK	3 pedoman dan 30 KK ^{K)}	-
			- Tersusunnya Pedoman untuk perusahaan KK/PKP2B dan Kajian tahap Produksi Mineral	1 Pedoman dan 10 KK	3 pedoman dan 30 KK ^{K)}	23,1

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

NO	PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
			Jumlah pengawasan produksi kepada perusahaan KK dan PKP2B	Produksi: 10KK/ 45PKP2B Konstruksi: 5 KK/ 15 PKP2B	Produksi: 50KK/ ^{K)} 225PKP2B Konstruksi: 25 KK/ 75 PKP2B	52,8
			Evaluasi Rencana dan Pelaksanaan Kegiatan Perusahaan KK dan PKP2B	Produksi: 10KK/45PKP2B Konstruksi: 5 KK/ 15 PKP2B	Produksi: 50KK/ ^{K)} 225PKP2B Konstruksi: 25 KK/75 PKP2B	7,7
			Jumlah invoice/kontrak penjualan KK/PPK2B yang dievaluasi	10 KK/ 45 PKP2B	70 KK/225 PKP2B ^{K)}	-
			- Terevaluasinya invoice/kontrak penjualan KK/PPK2B yang dievaluasi	10 KK/ 45 PKP2B	70 KK/225 PKP2B ^{K)}	60,3
			Jumlah KP Mineral di Sulteng dan Sultra & batubara di Kalsel dan Kaltim yang diinventarisir	700	2200 ^{K)}	-
			- Inventarisir jumlah KP Mineral di Sulteng dan Sultra & batubara di Kalsel dan Kaltim yang diinventarisir	100	200 ^{K)}	3,5
			Jumlah daerah yang terkait dengan aktivitas Pertambangan Tanpa Izin (PETI)	3 Prov. 25 Kab	3 prov 25 kab ^{K)}	-
			- Inventarisasi daerah yang terkait dengan aktivitas Pertambangan Tanpa Izin (PETI)	3 Prov. 25 Kab	3 prov 25 kab ^{K)}	20,2
			Jumlah proses Persetujuan Prinsip. Peningkatan Tahap dan Perubahan Luas Wilayah KK dan PKP2B	42 KK 76 PKP2B	210 KK 370 PKP2B ^{K)}	-
			- Evaluasi proses Persetujuan Prinsip. Peningkatan Tahap dan Perubahan Luas Wilayah KK dan PKP2B	42 KK 76 PKP2B	210 KK 370 PKP2B ^{K)}	5,4
			Jumlah dokumen elektronik berupa rekapitulasi data perizinan IUP. IUPK. KK dan PKP2B	500	3100 ^{K)}	-
			- Terdatanya dokumen elektronik berupa rekapitulasi data perizinan IUP. IUPK. KK dan PKP2B	500	3100 ^{K)}	4,6

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

NO	PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
			Jumlah lokasi pelaksanaan pembinaan perizinan perusahaan mineral dan batubara	3 Provinsi 25 Kab	15 Provinsi 1 25 Kab ^{K)}	-
			- Pelaksanaan pembinaan perizinan perusahaan mineral dan batubara	3 Provinsi 25 Kab	15 Provinsi 1 25 Kab ^{K)}	20,3
			Jumlah lokasi pelaksanaan sosialisasi PP tentang Perusahaan Pertambangan Minerba Sebagai Pelaksanaan UU No.4 Tahun 2009	5 Provinsi	25 provinsi ^{K)}	-
			- Pelaksanaan sosialisasi PP tentang Perusahaan Pertambangan Minerba Sebagai Pelaksanaan UU No.4 Tahun 2009	5 Provinsi	25 provinsi ^{K)}	10,3
			Peningkatan mutu serta kinerja pelayanan Pelayanan Usaha Minerba dalam menjalankan tugas dan fungsinya	1 PKT	1 pkt ^{K)}	3,8
			Persentase Pelaksanaan Pedoman	1 pedoman	5 pedoman ^{K)}	3,8
			Jumlah kontrak KK dan PKP2B yang sudah di amandemen	42 KK 76 PKP2B	42 KK 76 PKP2B ^{K)}	-
			- Evaluasi Jumlah kontrak KK dan PKP2B yang sudah di amandemen	42 KK 76 PKP2B	42 KK 76 PKP2B ^{K)}	9,9
3.	Pembinaan dan Perusahaan Panas Bumi dan Air Tanah	Tercapainya target PNBPN dari sektor panas bumi	- Verifikasi/ inventarisasi/ rekonsiliasi/ sosialisasi kajian PNBPN bidang pertambangan panas bumi	1 pkt	5 pkt ^{K)}	19,3
			Jumlah pemanfaatan langsung energi panas bumi	0	5 ^{K)}	-
		Tercapainya target pemanfaatan langsung panas bumi	- Pelaksanaan penugasan survei pendahuluan untuk meningkatkan status potensi	6	30 ^{K)}	4,6
		Tersedianya data potensi panas bumi yang menarik bagi investor	- Inventarisasi pajak air tanah (provinsi)	6	33 ^{K)}	10,5
			Jumlah inventarisasi pajak air tanah (provinsi)	6	33 ^{K)}	-
		Tersedianya informasi yang lengkap tentang pajak air tanah di daerah dari 33 provinsi	- Penetapan Zona Pemanfaatan Air Tanah (CAT)	6	33 ^{K)}	34,3
			Jumlah Penetapan Zona Pemanfaatan Air Tanah (CAT)	6	33 ^{K)}	-

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

NO	PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
		Tersedianya zona pemanfaatan air tanah dari 33 provinsi	Inventarisasi investasi produksi industri minuman berbahan baku air tanah (Provinsi)	1	5 ^(K)	7,7
			Jumlah inventarisasi investasi produksi industri minuman berbahan baku air tanah (Provinsi)	1	5 ^(K)	-
4.	Pembinaan Ketechnikan Lindungan Lingkungan dan Usaha Penunjang Mineral. Batubara. Panas Bumi dan Air Tanah	Tersedianya sebanyak 200 standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang lindungan lingkungan, keselamatan pertambangan, standardisasi, teknik pertambangan serta usaha	Jumlah rancangan SNI dan SKKNI bidang pertambangan Minerabapabum	5 SNI & 4 SKKNI	25 SNI dan 20 SKKNI ^(K)	-
			- Penyusunan rancangan SNI dan SKKNI bidang pertambangan Minerabapabum	5 SNI & 4 SKKNI	25 SNI dan 20 SKKNI ^(K)	16,2
		Terciptanya kegiatan pertambangan mineral, batubara dan panas bumi yang memenuhi kaidah <i>good mining practice</i>	Jumlah kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara yang taat melakukan pelaksanaan reklamasi lahan bekas tambang	60	312 ^(K)	-
			- Pengawasan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara yang taat melakukan pelaksanaan reklamasi lahan bekas tambang	60	312 ^(K)	8,3
		Tersedianya 1000 orang inspektur tambang di seluruh Indonesia dan peningkatan kemampuan teknis melalui diklat pusat maupun daerah	Jumlah kompetensi tenaga kerja industri pertambangan minerabapabum melalui sertifikasi	100	750 ^(K)	-
			- Pelaksanaan kompetensi tenaga kerja industri pertambangan minerabapabum melalui sertifikasi	100	750 ^(K)	7,6
		Meningkatnya kompetensi KTT dan penanggung jawab kegiatan di lapangan pada IUP (KP)	Persentase recovery penambangan dan pengolahan terkait konservasi bahan galian pada kegiatan usaha pertambangan	85	95	8,5
			Tingkat kekerapan kecelakaan pada perusahaan pertambangan	0.74	0.66	-
			- Evaluasi kekerapan kecelakaan pada perusahaan pertambangan	0,74	0.66	3,5
			Luas lahan kegiatan usaha pertambangan yang reklamasi oleh pemegang usaha pertambangan	6000 ha	31400 ha ^(K)	-

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

NO	PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
			- Pengawasan luas lahan kegiatan usaha pertambangan yang reklamasi oleh pemegang usaha pertambangan	6000 ha	31400 ha ^{K)}	9,1
			Jumlah peraturan menteri tentang pembinaan dan pengawasan kegiatan usaha pertambangan	6	23 ^{K)}	-
			- Penyusunan peraturan menteri tentang pembinaan dan pengawasan kegiatan usaha pertambangan	6	23 ^{K)}	9,5
			Jumlah norma/pedoman teknis/juknis/kriteria aspek K3. keselamatan operasi. teknis pertambangan. lindungan lingkungan. usaha jasa dan standardisasi	14	146 ^{K)}	-
			- Penyusunan norma/pedoman teknis/juknis/kriteria aspek K3. keselamatan operasi. teknis pertambangan. lindungan lingkungan. usaha jasa dan standardisasi	14	146 ^{K)}	27,3
			Jumlah usaha jasa lokal dan nasional yang berusaha di bidang usaha jasa pertambangan	600	3550 ^{K)}	-
			- Evaluasi usaha jasa lokal dan nasional yang berusaha di bidang usaha jasa pertambangan	600	3550 ^{K)}	20,7
			Jumlah SNI/SKKNI hasil kaji ulang	6	36 ^{K)}	-
			- Penyusunan SNI/SKKNI hasil kaji ulang	6	36 ^{K)}	3,8
			Jumlah Propinsi/ perguruan tinggi/ perusahaan yang memahami dengan baik system kompetensi dan SNI	3	15 ^{K)}	-
			- Sinkronisasi dan sosialisasi mengenai sistem kompetensi dan SNI	3	15 ^{K)}	4,0
			Jumlah Perusahaan yang menerapkan standar	15	95 ^{K)}	-
			- Pengawasan terhadap Perusahaan yang menerapkan standar	15	95 ^{K)}	4,0
			Jumlah Pemda yg melaksanakan pengelolaan usaha pertambangan yg benar	20	100 ^{K)}	-

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

NO	PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
			- Evaluasi Pemda yg melaksanakan pengelolaan usaha pertambangan yg benar	20	100	11,5
			Jumlah perusahaan yang laik secara teknik	60	300	-
			- Evaluasi perusahaan yang laik secara teknik	60	300	16,9
			Jumlah Inventarisasi daerah yg terkena dampak pengolahan emas menggunakan bahan kimia	3	15	-
			- Inventarisasi daerah yg terkena dampak pengolahan emas menggunakan bahan kimia	3	15	3,0
			Jumlah perusahaan tambang yg melakukan perencanaan pasca tambang sesuai dengan tata guna lahan	15	75	-
			Evaluasi perusahaan tambang yg melakukan perencanaan pasca tambang sesuai dengan tata guna lahan	15	75	3,3
			Jumlah Inventarisasi Penguasaan dan penetapan teknologi perusahaan	3	15	-
			Inventarisasi Penguasaan dan penetapan teknologi perusahaan	3	15	2,0
			Jumlah pengawasan perusahaan usaha jasa	40	200	-
			Pengawasan perusahaan usaha jasa	40	200	8,7
			Jumlah perusahaan yang dinilai dlm rangka penilaian prestasi K3	60	300	-
			Pengawasan perusahaan yang dinilai dlm rangka penilaian prestasi K3	60	300	3,3
			Jumlah tim yg berperan dlm fire & rescue challenge regional	19	99	-
			Pengawasan tim yg berperan dlm fire & rescue challenge regional	19	99	4,0

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

NO	PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
			Jumlah pemda yg berperan aktif dlm pengawasan K3	40	200 ^{K)}	-
			Monitoring pemda yg berperan aktif dlm pengawasan K3	40	200 ^{K)}	5,6
			Jumlah perusahaan yg dinilai dlm rangka prestasi pengelolaan lingkungan	45	225 ^{K)}	-
			Penilaian terhadap perusahaan dlm rangka prestasi pengelolaan lingkungan	45	225 ^{K)}	6,3
			Penyelesaian kasus lingkungan	100%	100%	3,9
			Jumlah perusahaan yg berperan dlm meningkatkan nilai tambah, pengelolaan pertambangan dengan baik	15	75 ^{K)}	-
			Evaluasi terhadap perusahaan yg berperan dlm meningkatkan nilai tambah, pengelolaan pertambangan dengan baik	15	75 ^{K)}	23,4
			Jumlah Laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	1	5 ^{K)}	-
			Penyusunan Laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	1	5 ^{K)}	1,6
			Jumlah kepala dinas dan aparat yang meningkat memahaminya dalam GMP	50	250 ^{K)}	-
			Penilaian terhadap kepala dinas dan aparat yang meningkat memahaminya dalam GMP	50	250 ^{K)}	23,0
			Jumlah SDM yg meningkat kemampuan keteknikan dan lingkungan	50	250 ^{K)}	-
			Penilaian terhadap SDM yg meningkat kemampuan keteknikan dan lingkungan	50	250 ^{K)}	18,6

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

NO	PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
C.	KEGIATAN PENDUKUNG					845,6
1.	Dukungan Manajemen dan Teknis Direktorat Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi	Terintegrasinya informasi pertambangan se-Indonesia	Jumlah SOP yang akan dibuat <i>dan direvisi</i> dalam penyempurnaan tata laksana organisasi - Penyusunan SOP DJMBP	108 1 dokumen	598 5 dokumen	 3,2
Tersusunnya Rancangan Peraturan Perundang-undangan Mineral, Batubara dan Panas Bumi (sebanyak 28 pedoman dan 4 RPP); - Pelaksanaan integrasi jaringan DJMBP		Jumlah publik yang mengunjungi situs informasi bidang mineral, batubara dan panas bumi - Pelaksanaan integrasi jaringan DJMBP	20000 1 paket	139000 5 paket	 34,0	
Terlaksananya sinkronisasi kebijakan usaha pertambangan umum, panas bumi, dan air tanah dengan sektor lain dapat dilaksanakan;		Jumlah regulasi bidang pertambangan mineral, batubara dan panas bumi - Penyusunan konsep rancangan PP dan Permen ESDM bidang mineral, batubara dan panas bumi	16 22 keg	90 142 keg	 71,0	
Tercapainya sistem dan mekanisme perencanaan dan pelaporan efisien dan efektif		Persentase realisasi pelaksanaan anggaran di lingkungan DJMBP - Pembinaan dan evaluasi hasil pemeriksaan dan tindak lanjut	100 1 laporan	100 5 laporan	 11,0	
		- Pembukuan verifikasi dan pelaksanaan anggaran	1 laporan	5 laporan	-	
		- Pembinaan Pengelolaan keuangan dan akuntansi pemerintah	13 laporan	65 laporan	-	
Tercapainya peningkatan SDM yang berkualitas		Persentase pelaksanaan koordinasi bidang mineral, batubara, panas bumi dan air tanah dengan instansi terkait - Pelaksanaan koordinasi bidang mineral, batubara dan panas bumi	100 1 paket	100 5 paket	 59,9	
		Terkelolanya sarana dan prasarana secara optimal dalam mendukung pelaksanaan kebijakan;	Jumlah dokumen rencana kerja dan anggaran berbasis kinerja yang disusun dan disempurnakan - Penyusunan dokumen rencana kerja dan anggaran berbasis kinerja	6 6	30 30	 9,8

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

NO	PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
		Terlaksananya koordinasi internal yang optimal dan pelayanan publik yang prima.	Jumlah pelaporan hasil pemeriksaan (LHP)	13	65	-
			- Penyusunan pelaporan hasil pemeriksaan (LHP)	10	50	5,5
			Jumlah dan jenis layanan informasi bidang mineral, batubara, panas bumi dan air tanah	15	100	-
			- Pelaksanaan dan pembuatan jenis dan layanan informasi bidang mineral, batubara dan panas bumi	15	100	17,6
			Jumlah penyelenggaraan inspektur tambang	23	507	6,0
			Persentase PNS yang memiliki kompetensi yang sesuai spesifikasi bidang mineral, batubara, panas bumi dan air tanah	29	329	-
			- Pembinaan terhadap PNS yang memiliki kompetensi yang sesuai spesifikasi bidang mineral, batubara, panas bumi dan air tanah	135	1485	6,8
			Kualitas data yang mutakhir untuk periode triwulan dan tahunan	5 dok	0	-
			- Penyusunan data yang mutakhir untuk periode triwulan dan tahunan	5 dok	0	4,1
			Prosentasi Pengumpulan dan evaluasi laporan di DJMBP yang akurat dan tepat waktu.	100	500	-
			- Pelaksanaan Pengumpulan dan evaluasi laporan di DJMBP yang akurat dan tepat waktu.	7 keg	35 keg	15,3
			Prosentasi Pelaksanaan program dan kegiatan di DJMBP sesuai dengan rencana dan tepat waktu	100	100	-
			- Pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan di DJMBP sesuai dengan rencana dan tepat waktu	6 lap	30 lap	13,7
			Persentase tingkat pengelolaan administrasi perbendaharaan dan barang milik negara	100	100	-

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

NO	PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
			- Penyusunan pengelolaan administrasi perbendaharaan dan barang milik Negara	3 lap	15 keg	85,8
			Tingkat tertib administrasi pengelolaan ketatausahaan. kearsipan dan rumah tangga	80	100	-
			- Penyusunan administrasi pengelolaan ketatausahaan. kearsipan dan rumah tangga	17 keg	85	104,0
			Persentase tingkat pengelolaan administrasi kepegawaian	99	99	-
			- Pembinaan pengelolaan kepegawaian	11 lap	55 lap	31,6
			Persentase Terbayarnya gaji/honor/tunjangan pegawai	100	100	-
			- Terbayarnya gaji/honor/tunjangan pegawai	453 org	2265 org	144,2
			Persentase Terselenggaranya operasional dan pemeliharaan perkantoran dengan baik	100	100	-
			- Terselenggaranya operasional dan pemeliharaan perkantoran dengan baik	13 pkt	65	136,0
			- Persentase Terselenggaranya pelayanan publik/birokrasi sesuai tugas dan fungsi masing-masing saker	100	500	-
			- Terlaksananya pelayanan publik/birokrasi sesuai tugas dan fungsi masing-masing saker	1 pkt	5 pkt	86,4
VII	PROGRAM PENELITIAN, MITIGASI DAN PELAYANAN GEOLOGI					3.970,5
A.	KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL					1.871,8
1.	Survei dan Pelayanan Geologi	Meningkatnya pemanfaatan hasil survei penelitian, penyelidikan dan pelayanan geologi	Jumlah wilayah/kawasan pemetaan geologi bersistem dan bertema	2	10 ^{K)}	348,7
			Jumlah peta geofisika bersistem dan bertema yang dihasilkan	2	14 ^{K)}	432,1
			Jumlah peta geokimia yang dihasilkan,	6	30 ^{K)}	34,7

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

NO	PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
			Jumlah peta seismotektonik yang dihasilkan ,	2	10 ^(K)	15,4
			Jumlah peta geomorfologi yang dihasilkan	2	10 ^(K)	15,4
			Jumlah peta geologi kuarter yang dihasilkan	2	10 ^(K)	21,8
			Jumlah perolehan / pendaftaran sistim mutu	7	35 ^(K)	11,1
2.	Penyelidikan dan Pelayanan Sumber Daya Geologi	Meningkatnya pemanfaatan wilayah keprospekaan sumber daya geologi	Jumlah lokasi Penyelidikan status keprospekan sumber daya Panas bumi	22	110 ^(K)	154,7
			Jumlah lokasi Penyelidikan status keprospekan sumber daya Batubara dan CBM	18	90 ^(K)	480,7
			Jumlah lokasi Penyelidikan status keprospekan sumber daya Gambut dan Bitumen Padat	5	25 ^(K)	16,6
			Jumlah lokasi Penyelidikan status keprospekan sumber daya mineral	28	144 ^(K)	88,4
			Jumlah kegiatan kajian/evaluasi WKP dan WP	8	40 ^(K)	57,5
3.	Mitigasi dan Pelayanan Kebencanaan Geologi	Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dan penyelidikan di bidang vulkanologi dan mitigasi bencana geologi	Jumlah Peta Geologi Gunungapi Aktif	2	10 ^(K)	17,7
			Jumlah Peta Kawasan Rawan Bencana Gunungapi Aktif Skala 1:50,000	1	5 ^(K)	8,3
			Jumlah peta yang diterbitkan Peta Zona Kerentanan Gerakan Tanah	5	25 ^(K)	34,4
			Jumlah peta yang diterbitkan Peta Kawasan Rawan Bencana Gempabumi dan Tsunami	3	15 ^(K)	15,1
			Jumlah gunung api yang dipantau untuk kegiatan gunungapi aktif tipe A dari Pos Pengamatan Gunungapi	10	66 ^(K)	50,2
			Jumlah kegiatan pemahaman masyarakat tentang kebencanaan geologi melalui pelatihan kebencanaan, pameran, dan pembuatan film yang lebih intensif	7	35 ^(K)	3,9

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

NO	PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
			Jumlah Pedoman/peraturan/norma Mitigasi Bencana Gunungapi dan Pedoman Gerakan Tanah, Gempabumi dan Tsunami	2	10 ^{K)}	8,1
4.	Riset dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi	Meningkatnya pemanfaatan hasil pengembangan metoda dan teknologi dalam mendukung upaya mitigasi bencana geologi	Jumlah perangkat sistem monitoring kegunungapian hasil rancang bangun sendiri di 20 gunung api	4	20 ^{K)}	13,8
			Jumlah data geokimia gunungapi di 25 gunungapi	4	25 ^{K)}	19,3
			Jumlah kegiatan mitigasi di kawasan Bencana G. Merapi	15	80 ^{K)}	24,0
B.	KEGIATAN PRIORITAS BIDANG				0 ^{K)}	577,2
1.	Survei dan Pelayanan Geologi	Meningkatnya pemanfaatan hasil survei penelitian, penyelidikan dan pelayanan geologi	· Terwujudnya museum tsunami NAD yang terpelihara	1	2 ^{K)}	82,5
2.	Dokumentasi Koleksi dan Pelayanan Museum Geologi	Meningkatnya pemanfaatan informasi geologi bagi masyarakat	· Kegiatan Pengelolaan Museum Geologi untuk meningkatkan pelayanan pengunjung	2	10 ^{K)}	4,1
			· Jumlah survei, kajian dan penelitian geologi yang dihasilkan	12	60 ^{K)}	3,6
			· Peningkatan jumlah koleksi	1	5 ^{K)}	3,5
			· Jumlah koleksi geologi yang dipelihara	5	25 ^{K)}	1,1
			· Jumlah koleksi geologi yang terdata	30.000	150000 ^{K)}	6,1
			· Jumlah sarana dan prasarana peragaan Museum Geologi	7 Corner/Sudut	74 corner/sudut ^{K)}	22,1
3.	Penelitian dan Pelayanan Geologi Lingkungan dan Air Tanah	Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian, penyelidikan, dan pemetaan bidang lingkungan geologi dan air tanah	· Jumlah peta geologi teknik bersistem 1:100,000	6	30 ^{K)}	7,5
			· Jumlah peta geologi teknik untuk Infrastruktur	6	33 ^{K)}	7,5
			· Jumlah lokasi yang telah dilakukan penyelidikan kondisi geologi teknik geodinamik dan infra struktur kawasan andalan pertambangan	9	42 ^{K)}	11,2

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

NO	PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
			· Jumlah informasi hasil penelitian geologi teknik	1	5 ^{K)}	1,2
			· Jumlah kawasan karst terpetakan pada skala 1:50,000	2	10 ^{K)}	2,5
			· Jumlah lokasi yang dilakukan pemetaan geologi lingkungan untuk tata ruang pada skala 1:100,000	17	85 ^{K)}	21,1
			· Jumlah lokasi yang dilakukan pemetaan geologi lingkungan kawasan pertambangan untuk tata ruang pada skala 1:100,000	7	35 ^{K)}	8,7
			· Jumlah sumur bor sumber air bersih penduduk di desa tertinggal dan daerah sulit air	100	500 ^{K)}	334,3
			· Jumlah rekomendasi konservasi kawasan lindung geologi dan air tanah, dan pengelolaan tata ruang	19	96 ^{K)}	23,6
			· Jumlah peta hidro geologi bersistem skala 1:250.000	5	25 ^{K)}	7,5
			· Jumlah peta potensi cekungan air tanah skala 1:100.000	2	14 ^{K)}	7,5
			· Jumlah peta konservasi air tanah	5	15 ^{K)}	11,2
4.	Mitigasi dan Pelayanan Kebencanaan Geologi	Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dan penyelidikan di bidang vulkanologi dan mitigasi bencana geologi	· Jumlah layanan pemberian rekomendasi teknis hasil mitigasi bencana geologi;	1	5 ^{K)}	10,5
C.	KEGIATAN PENUNJANG					1.521,5
1.	Manajemen, Dukungan Teknis, dan Pelayanan Sekretariat Badan Geologi	Meningkatnya manajemen, dukungan teknis, dan pelayanan administrasi kepada semua unsur di lingkungan Badan Geologi	· Jumlah kegiatan penyusunan program, rencana kerja dan anggaran; laporan dan evaluasi Badan Geologi	8	41	16,1

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

NO	PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
			· Terpuhinya kebutuhan pegawai, sarana parasarana dan lancarnya kegiatan sehari hari perkantoran (bulan)	12	60	50,7
			· Pengembangan organisasi dan kelembagaan Badan Geologi Indonesia	1	1	2,5
			· Jumlah kegiatan pengembangan jaringan sistem informasi	1	5	3,0
			· Jumlah kegiatan pengelolaan data dan informasi Geologi	4	20	12,5
			· Jumlah kegiatan pembinaan aparatur, pola karier dan administrasi kepegawaian	17	85	41,4
			· Jumlah PNS Badan Geologi yang dikembangkan kompetensinya	15	90	10,1
			· Jumlah kegiatan publikasi dan diseminasi informasi	7	35	14,4
			· Jumlah kegiatan administrasi dan akuntansi keuangan Badan Geologi menuju kesesuaian dengan standar yang ditetapkan	17	87	45,3
			· Jumlah usulan peraturan bidang geologi	4	16	14,9
			· Jumlah kegiatan pengembangan hukum dan kehumasan Badan Geologi	15	75	19,3
			· Jumlah kegiatan administrasi perlengkapan, sarana prasarana, kearsipan, tatausaha, dan rumah tangga Badan Geologi menuju kesesuaian dengan standar yang ditetapkan Geologi dengan standar yang ditetapkan	7	35	48,5
			· Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Konsolidasi Badan Geologi yang dilaksanakan (Bulan)	12	60	43,4

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

NO	PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
2	Survei dan Pelayanan Geologi	Meningkatnya pemanfaatan hasil survei penelitian, penyelidikan dan pelayanan geologi	· Terpenuhinya kebutuhan pegawai, sarana parasarana dan lancarnya kegiatan sehari hari perkantoran (bulan)	12	60	368,1
3	Dokumentasi Koleksi dan Pelayanan Museum Geologi	Meningkatnya pemanfaatan informasi geologi bagi masyarakat	· Terpenuhinya kebutuhan pegawai, sarana parasarana dan lancarnya kegiatan sehari hari perkantoran (bulan)	12	60	55,0
4	Penyelidikan dan Pelayanan Sumber Daya Geologi	Meningkatnya pemanfaatan wilayah keprospekaan sumber daya geologi	· Terpenuhinya kebutuhan pegawai, sarana parasarana dan lancarnya kegiatan sehari hari perkantoran	12	60	239,3
5	Penelitian dan Pelayanan Geologi Lingkungan dan Air Tanah	Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian, penyelidikan, dan pemetaan bidang lingkungan geologi dan air tanah	· Terpenuhinya kebutuhan pegawai, sarana parasarana dan lancarnya kegiatan sehari hari perkantoran (bulan)	12	60	242,4
6	Mitigasi dan Pelayanan Kebencanaan Geologi	Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dan penyelidikan di bidang vulkanologi dan mitigasi bencana geologi	· Terpenuhinya kebutuhan pegawai, sarana parasarana dan lancarnya kegiatan sehari hari perkantoran (bulan)	12	60	294,3
VIII	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL					4.064,6
A.	KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL					618,9
1.	Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi	Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan teknologi minyak dan gas bumi.	Jumlah Kegiatan Penelitian dan Pengembangan	47	3 pedoman dan 30 KK ^{K)}	359,9
2.	Penelitian dan Pengembangan Teknologi Ketenagalistikan dan Energi Baru Terbarukan	Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan teknologi ketenagalistrikan dan energi baru terbarukan.	Jumlah Kegiatan Penelitian dan Pengembangan	22	90 ^{K)}	133,7
3.	Penelitian dan Pengembangan Geologi Kelautan	Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan geologi kelautan	Jumlah Kegiatan Penelitian dan Pengembangan	13	75 ^{K)}	125,3

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

NO	PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
B.	KEGIATAN PRIORITAS BIDANG					501,0
1.	Penelitian dan Pengembangan Teknologi Mineral dan Batubara	Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan teknologi mineral dan batubara.	o Jumlah Kegiatan Penelitian dan Pengembangan	44	216	142,3
			o Jumlah Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) kegiatan Jasa Penelitian dan Pengembangan terhadap target yang ditetapkan (Dalam Juta Rp)	3.028	17518	17,5
2.	Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi	Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan teknologi minyak dan gas bumi.	o Jumlah Kontrak Pelayanan Jasa Teknologi	40	244	-
			o Jumlah Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) kegiatan Jasa Penelitian dan Pengembangan terhadap target yang ditetapkan (Dalam Juta Rp)	45.495	338.557	336,4
3.	Penelitian dan Pengembangan Teknologi Ketenagalistikan dan Energi Baru Terbarukan	Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan teknologi ketenagalistrikan dan energi baru terbarukan.	o Jumlah Kontrak Pelayanan Jasa Teknologi	1	5	-
			o Jumlah Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) kegiatan Jasa Penelitian dan Pengembangan terhadap target yang ditetapkan (Dalam Juta Rp)	200	1.000	0,8
4.	Penelitian dan Pengembangan Geologi Kelautan	Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan geologi kelautan	o Jumlah Kontrak Pelayanan Jasa Teknologi	2	10	-
			o Jumlah Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) kegiatan Jasa Penelitian dan Pengembangan terhadap target yang ditetapkan (Dalam Juta Rp)	1.000	5.000	4,0
C.	KEGIATAN PENUNJANG					2.944,7
1.	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral	Meningkatnya pembinaan, koordinasi dan dukungan teknis bagi Badan Penelitian dan Pengembangan secara optimal.	o Jumlah Koordinasi Perencanaan Kebijakan Program	3	19	7,4
			o Jumlah Kegiatan Pengelolaan Administratif Kepegawaian	13	65	13,3
			o Jumlah Kegiatan Pengelolaan Administrasi Keuangan	6	30	8,5
			o Jumlah Pengelolaan Aset Barang Milik Negara yang Dilaporkan Sebagai Kekayaan Negara	5	25	9,6

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

NO	PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
			o Jumlah Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi	6	30	17,1
			o Jumlah Penilaian Jabatan Struktural dan Fungsional	3	15	7,1
			o Jumlah Koordinasi Kerjasama Litbang	3	15	7,1
			o Jumlah Penyelenggaraan Diseminasi Hasil Litbang	4	20	8,2
			o Jumlah Pengelolaan Ketatausahaan, Kearsipan dan Rumah Tangga	5	25	8,4
			o Jumlah Sarana dan Prasarana Perkantoran Yang Dibangun/Direhab/Ditingkatkan	2	10	9,5
			o Jumlah Pembayaran Gaji, Operasional Perkantoran dan Pelayanan Publik	3	15	69,7
			o Jumlah Kegiatan Yang Didanai oleh PNBPN	2	10	19,1
2	Penelitian dan Pengembangan Teknologi Mineral dan Batubara	Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan teknologi mineral dan batubara.	o Jumlah Pembayaran Gaji, Operasional Perkantoran dan Pelayanan Publik	3	15	212,2
			o Jumlah Kegiatan Penunjang Kelitbangan Lainnya	36	180	168,8
			o Jumlah Kegiatan Yang Didanai oleh PNBPN	30	150	150,0
3	Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi	Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan teknologi minyak dan gas bumi.	o Jumlah Pembayaran Gaji, Operasional Perkantoran dan Pelayanan Publik	3	15	648,8
			o Jumlah Kegiatan Penunjang Kelitbangan Lainnya	50	146	237,4
			o Jumlah Kegiatan Yang Didanai oleh PNBPN	6	14	324,1
4	Penelitian dan Pengembangan Teknologi Ketenagalistikan dan Energi Baru Terbarukan	Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan teknologi ketenagalistrikan dan energi baru terbarukan.	o Jumlah Pembayaran Gaji, Operasional Perkantoran dan Pelayanan Publik	3	15	60,7
			o Jumlah Kegiatan Penunjang Kelitbangan Lainnya	38	134	65,5
			o Jumlah Kegiatan Yang Didanai oleh PNBPN	4	20	110,5
5	Penelitian dan Pengembangan Geologi Kelautan	Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan geologi kelautan	o Jumlah Pembayaran Gaji, Operasional Perkantoran dan Pelayanan Publik	3	15	158,5
			o Jumlah Kegiatan Penunjang Kelitbangan Lainnya	49	245	194,2
			o Jumlah Kegiatan Yang Didanai oleh PNBPN	85	425	428,9

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

NO	PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
IX	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL					4.343,1
A.	KEGIATAN PRIORITAS BIDANG					1.486,6
1.	Pendidikan dan Pelatihan Minyak dan Gas Bumi	Terwujudnya sumberdaya manusia sub sektor minyak dan gas bumi yang memiliki kompetensi, profesional, berdaya saing tinggi, dan bermoral dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan	<ul style="list-style-type: none"> · Jumlah penyelenggaraan diklat dalam setahun · Jumlah NSPK diklat yang ditetapkan dan diberlakukan · Jumlah SDM Aparatur yang ditingkatkan kemampuannya · Prosentase tingkat kinerja organisasi · Jumlah jenis diklat yang dibutuhkan · Jumlah dokumen perencanaan · Jumlah sarana diklat yang terakreditasi standar mutu · Jumlah kegiatan pelayanan jasa sarana, keahlian, dan sertifikasi · Jumlah sistem informasi yang diimplementasikan 	<ul style="list-style-type: none"> 139 260 103 90 1 2 8 27 2 	<ul style="list-style-type: none"> 718 ^{K)} 1308 ^{K)} 559 ^{K)} 95 48 ^{K)} 10 ^{K)} 40 ^{K)} 149 ^{K)} 23 ^{K)} 	<ul style="list-style-type: none"> 137,2 9,2 7,1 0,4 1,6 1,0 9,9 545,6 0,8
2.	Pendidikan dan Pelatihan Ketenagalistrikan dan Energi Baru Terbarukan	Terwujudnya sumberdaya manusia sub sektor ketenagalistrikan dan energi baru terbarukan yang memiliki kompetensi, profesional, berdaya saing tinggi, dan bermoral dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan	<ul style="list-style-type: none"> · Jumlah penyelenggaraan diklat dalam setahun · Jumlah NSPK diklat yang ditetapkan dan diberlakukan · Jumlah SDM Aparatur yang ditingkatkan kemampuannya · Jumlah Lembaga Diklat Profesi/LDP yang terakreditasi sebagai penyelenggara Diklat Teknis · Prosentase tingkat kinerja organisasi · Jumlah karya ilmiah · Jumlah jenis diklat yang dibutuhkan · Jumlah dokumen perencanaan 	<ul style="list-style-type: none"> 36 12 50 3 100 10 3 3 	<ul style="list-style-type: none"> 203 ^{K)} 67 ^{K)} 250 ^{K)} 29 ^{K)} 100 59 ^{K)} 15 ^{K)} 12 ^{K)} 	<ul style="list-style-type: none"> 42,0 13,9 16,2 0,7 2,3 0,9 4,1 2,4

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

NO	PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
			· Jumlah kerjasama diklat yang diimplementasikan	3	15 ^{K)}	8,8
			· Jumlah kegiatan promosi diklat	4	28 ^{K)}	1,6
			· Jumlah sistem informasi yang diimplementasikan	1 pkt	5 paket ^{K)}	0,8
3.	Pendidikan dan Pelatihan Geologi	Terwujudnya sumberdaya manusia bidang kegeologian yang memiliki kompetensi, profesional, berdaya saing tinggi, dan bermoral dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan	· Jumlah penyelenggaraan diklat dalam setahun	40	297 ^{K)}	149,2
			· Jumlah NSPK diklat yang ditetapkan dan diberlakukan	110	641 ^{K)}	37,6
			· Jumlah SDM Aparatur yang ditingkatkan kemampuannya	60	347 ^{K)}	19,9
			· Prosentase tingkat kinerja organisasi	90	95	2,8
			· Jumlah publikasi karya ilmiah	2	10 ^{K)}	1,9
			· Jumlah karya ilmiah	20	120 ^{K)}	7,2
			· Jumlah jenis diklat yang dibutuhkan	40	200 ^{K)}	9,9
			· Jumlah dokumen perencanaan	3	15 ^{K)}	5,5
			· Jumlah kegiatan pelayanan jasa sarana, keahlian, dan sertifikasi	6	57 ^{K)}	2,2
			· Jumlah kerjasama diklat yang diimplementasikan	5	37 ^{K)}	9,4
			· Jumlah kegiatan promosi diklat	2	10 ^{K)}	2,8
· Jumlah sistem informasi yang diimplementasikan	4	22 ^{K)}	4,4			
4.	Pendidikan dan Pelatihan Teknologi Mineral, Batubara dan Panas Bumi	Terwujudnya sumberdaya manusia sub sektor mineral, batubara, dan panas bumi yang memiliki kompetensi, profesional, berdaya saing tinggi, dan bermoral dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan	· Jumlah penyelenggaraan diklat dalam setahun	119	595 ^{K)}	154,7
			· Jumlah NSPK diklat yang ditetapkan dan diberlakukan	19	99 ^{K)}	27,6
			· Jumlah SDM Aparatur yang ditingkatkan kemampuannya	70	405 ^{K)}	8,9

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

NO	PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
			· Jumlah Lembaga Diklat Profesi/LDP yang terakreditasi sebagai penyelenggara Diklat Teknis	1	5 ^{K)}	0,6
			· Prosentase tingkat kinerja organisasi	100	100	2,5
			· Jumlah publikasi karya ilmiah	1	5 ^{K)}	0,9
			· Jumlah kegiatan penyempurnaan organisasi	2	10 ^{K)}	1,2
			· Jumlah karya ilmiah	3	15 ^{K)}	0,7
			· Jumlah jenis diklat yang dibutuhkan	5	25 ^{K)}	3,0
			· Jumlah dokumen perencanaan	2	10 ^{K)}	1,3
			· Jumlah kerjasama diklat yang diimplementasikan	10	70 ^{K)}	5,4
			· Jumlah kegiatan promosi diklat	1	9 ^{K)}	1,6
			· Jumlah sistem informasi yang diimplementasikan	7	35 ^{K)}	7,9
5.	Pendidikan Tinggi Energi dan Mineral	Terwujudnya peningkatan kegiatan pelaksanaan pendidikan formal Diploma I, II, III, IV dan pengembangan pendidikan tinggi energi dan sumber daya mineral	· Jumlah lulusan pendidikan formal tingkat Diploma I, II, III, dan IV.	241	1.626 ^{K)}	106,4
			· Jumlah NSPK yang ditetapkan dan diberlakukan	5	35 ^{K)}	4,0
			· Jumlah SDM Aparatur yang ditingkatkan kemampuannya	54	363 ^{K)}	3,2
			· Prosentase tingkat kinerja organisasi	90	95	0,4
			· Jumlah publikasi karya ilmiah	3	20 ^{K)}	0,4
			· Jumlah karya ilmiah	20	134 ^{K)}	3,3
			· Jumlah kerjasama pendidikan yang diimplementasikan	15	101 ^{K)}	1,1
			· Jumlah kegiatan promosi diklat	3	20 ^{K)}	1,0
			· Jumlah sistem informasi yang diimplementasikan	1	7 ^{K)}	1,0

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

NO	PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
6.	Pendidikan dan Pelatihan Tambang Bawah Tanah	Terwujudnya peningkatan kegiatan pelaksanaan dan pengembangan pendidikan dan pelatihan bidang tambang bawah tanah	· Jumlah penyelenggaraan diklat dalam setahun	12	80 ^{K)}	32,1
			· Jumlah NSPK diklat yang ditetapkan dan diberlakukan	13	86 ^{K)}	14,5
			· Jumlah SDM Aparatur yang ditingkatkan kemampuannya	36	192 ^{K)}	20,4
			· Jumlah Lembaga Diklat Profesi/LDP yang terakreditasi sebagai penyelenggara Diklat Teknis	1	15 ^{K)}	0,9
			· Prosentase tingkat kinerja organisasi	90	95	0,9
			· Jumlah publikasi karya ilmiah		10 ^{K)}	1,1
			· Jumlah jenis diklat yang dibutuhkan	2	10 ^{K)}	4,9
			· Jumlah dokumen perencanaan	4	17 ^{K)}	5,8
			· Jumlah sarana diklat yang terakreditasi standar mutu	-	10 ^{K)}	0,9
			· Jumlah kegiatan pelayanan jasa sarana, keahlian, dan sertifikasi	-	6 ^{K)}	0,8
			· Jumlah kerjasama diklat yang diimplementasikan	6	50 ^{K)}	4,7
			· Jumlah kegiatan promosi diklat	3	25 ^{K)}	1,3
			· Jumlah sistem informasi yang diimplementasikan	2	17 ^{K)}	2,0
C.	KEGIATAN PENUNJANG				^{K)}	2.856,5
1.	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Pendidikan dan Pelatihan ESDM	Terwujudnya peningkatan pembinaan, koordinasi pelayanan administrasi dan dukungan teknis bagi Badan Pendidikan dan Pelatihan secara optimal	· Jumlah penyelenggaraan diklat dalam setahun	1 paket	5 paket ^{K)}	7,6
			· Jumlah NSPK diklat yang ditetapkan dan diberlakukan	42	170 ^{K)}	31,0
			· Jumlah SDM Aparatur yang ditingkatkan kemampuannya	1.355	7.255 ^{K)}	105,3
			· Jumlah Lembaga Diklat Profesi/LDP yang terakreditasi sebagai penyelenggara Diklat Teknis	11	101 ^{K)}	7,2

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

NO	PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
			· Prosentase tingkat kinerja organisasi	90	95 ^{K)}	8,8
			· Jumlah kegiatan administrasi pengelolaan kepegawaian, umum dan keuangan	15	75 ^{K)}	105,1
			· Jumlah kegiatan penyempurnaan organisasi	3	15 ^{K)}	27,2
			· Jumlah dokumen perencanaan	34	170 ^{K)}	27,4
			· Jumlah kegiatan pengadaan pembangunan dan renovasi sarana dan prasarana	4	20 ^{K)}	110,5
			· Jumlah kerjasama diklat yang diimplementasikan	6	30 ^{K)}	27,4
			· Jumlah kegiatan promosi diklat	3	15 ^{K)}	12,0
			· Jumlah sistem informasi yang diimplementasikan	3	26 ^{K)}	15,7
2	Pendidikan dan Pelatihan Minyak dan Gas Bumi	Terwujudnya sumberdaya manusia sub sektor minyak dan gas bumi yang memiliki kompetensi, profesional, berdaya saing tinggi, dan bermoral dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan	· Jumlah kegiatan administrasi pengelolaan kepegawaian, umum dan keuangan	30	154 ^{K)}	332,1
			· Jumlah kegiatan pengadaan pembangunan dan renovasi sarana dan prasarana	18	150 ^{K)}	816,2
3	Pendidikan dan Pelatihan Ketenagalistrikan dan Energi Baru Terbarukan	Terwujudnya sumberdaya manusia sub sektor ketenagalistrikan dan energi baru terbarukan yang memiliki kompetensi, profesional, berdaya saing tinggi, dan bermoral dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan	· Jumlah kegiatan administrasi pengelolaan kepegawaian, umum dan keuangan	9	45 ^{K)}	65,4
			· Jumlah kegiatan pengadaan pembangunan dan renovasi sarana dan prasarana	3	15 ^{K)}	200,0
4	Pendidikan dan Pelatihan Geologi	Terwujudnya sumberdaya manusia bidang kegeologian yang memiliki kompetensi, profesional, berdaya saing tinggi, dan bermoral dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan	· Jumlah kegiatan administrasi pengelolaan kepegawaian, umum dan keuangan	22	117 ^{K)}	60,5
			· Jumlah kegiatan pengadaan pembangunan dan renovasi sarana dan prasarana	3	15 ^{K)}	121,6
5	Pendidikan dan Pelatihan Teknologi Mineral, Batubara, dan Panas Bumi	Terwujudnya sumberdaya manusia sub sektor mineral, batubara, dan panas bumi yang memiliki kompetensi, profesional, berdaya saing tinggi, dan bermoral dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan	· Jumlah kegiatan administrasi pengelolaan kepegawaian, umum dan keuangan	21	105 ^{K)}	81,8
			· Jumlah kegiatan pengadaan pembangunan dan renovasi sarana dan prasarana	9	45 ^{K)}	212,6

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

NO	PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
6	Pendidikan Tinggi Energi dan Mineral	Terwujudnya peningkatan kegiatan pelaksanaan pendidikan formal Diploma I, II, III, IV dan pengembangan pendidikan tinggi energi dan sumber daya mineral	· Jumlah kegiatan administrasi pengelolaan kepegawaian, umum dan keuangan	11	75 ^{K)}	86,8
			· Jumlah kegiatan pengadaan pembangunan dan renovasi sarana dan prasarana	16	107 ^{K)}	127,3
7	Pendidikan dan Pelatihan Tambang Bawah Tanah	Terwujudnya peningkatan kegiatan pelaksanaan dan pengembangan pendidikan dan pelatihan bidang tambang bawah tanah	· Jumlah kegiatan administrasi pengelolaan kepegawaian, umum dan keuangan	16	94 ^{K)}	26,1
			· Jumlah kegiatan pengadaan pembangunan dan renovasi sarana dan prasarana	6	22 ^{K)}	240,9
X	PROGRAM PENGATURAN DAN PENGAWASAN PENYEDIAAN DAN PENDISTRIBUSIAN BAHAN BAKAR MINYAK DAN PENGANGKUTAN GAS BUMI MELALUI					1.346,2
A.	KEGIATAN PRIORITAS BIDANG					859,1
1.	Pengaturan, penetapan dan pelaksanaan pengawasan penyediaan dan pendistribusian BBM	Pengaturan penyediaan dan pendistribusian BBM	Jumlah Badan Usaha yang mendapatkan Nomor Registrasi Usaha (NRU) dari BPH Migas	60 Badan usaha	320 Badan Usah ^{K)}	61,2
			Jumlah pemanfaatan bersama fasilitas pengangkutan dan penyimpanan BBM	1 Badan Usaha Pengangkutan	11 BU Pengangkutan ^{K)}	71,3
				1 Badan Usaha Penyimpanan	11 BU Penyimpanan ^{K)}	-
		Penetapan Cadangan BBM	Jumlah Penetapan Wilayah Distribusi Niaga (WDN) jenis BBM tertentu	4 Badan usaha	66 Badan Usaha ^{K)}	61,1
			Jumlah pengawasan infrastruktur penyediaan BBM Nasional	4 pengawasan	20 pengawasan ^{K)}	51,0
Pengawasan penyediaan dan pendistribusian BBM	Jumlah MoU BPH Migas dengan Pemda	10 MoU	70 MoU ^{K)}	489,8		

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

NO	PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
2.	Pengaturan, penetapan dan pengawasan pada kegiatan usaha pengangkutan Gas Bumi melalui pipa	Pengaturan pada kegiatan usaha pengangkutan Gas Bumi melalui pipa	Jumlah peraturan Pengaturan Akses (Access Arrangement) pada Ruas Transmisi dan/ atau Wilayah Jaringan Distribusi Milik Badan Usaha	3 Jumlah peraturan	25 peraturan ^{K)}	17,2
			Jumlah Lelang Ruas Transmisi Dan Wilayah Jaringan Distribusi (WJD) Gas Bumi Dalam Rangka Pemberian Hak Khusus	2 Ruas 4 WJD	20 ruas 30 WJD ^{K)}	19,4
			Jumlah Kajian Keekonomian Pembentukan Kota Gas	9 Kota/Kabupaten	55 kota/kab ^{K)}	16,8
		Penetapan pada kegiatan usaha pengangkutan Gas Bumi melalui pipa	Jumlah penetapan tarif pengangkutan Gas Bumi melalui pipa yang wajar dan efisien untuk pengguna pipa (Shipper) ruas transmisi	2 ruas transmisi	20 ruas transmisi ^{K)}	12,8
			Jumlah wilayah untuk penetapan harga Gas Bumi untuk Rumah Tangga dan pelanggan kecil	11 Wilayah	65 wilayah ^{K)}	12,1
			Jumlah Pemberian HK Ruas Transmisi dan Wilayah Jaringan Distribusi Gas Bumi	2 Ruas Transmisi 4 WJD	20 ruas transmisi 30 WJD ^{K)}	12,1
		Pengawasan pada kegiatan usaha pengangkutan Gas Bumi untuk RT dan PK	Jumlah Pelanggaran Penerapan Harga Gas Bumi Untuk Rumah Tangga dan Pelanggan Kecil	0 Pelanggaran terhadap Penerapan Harga Gas Bumi untuk RT dan PK	0 pelanggaran ^{K)}	10,2
			Jumlah Pelanggaran Akun Pengaturan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa	0 Pelanggaran Akun Pengaturan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa	0 pelanggaran ^{K)}	6,6
			Jumlah Pelanggaran Penerapan Tarif Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa	0 Pelanggaran Penerapan Tarif Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa	0 pelanggaran ^{K)}	7,7

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

NO	PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
			Jumlah Pelaksanaan Pemanfaatan Bersama Fasilitas Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa Transmisi dan Jaringan Distribusi Gas Bumi melalui pipa	2 Badan Usaha	20 Badan usaha ^{K)}	9,7
C.	KEGIATAN PENUNJANG				^{K)}	487,1
1.	Dukungan Manajemen dan dukungan pelaksanaan tugas teknis BPH Migas	a. Meningkatnya kelancaran pelayanan teknis dan administratif kepada semua unsur di lingkungan Badan Pengatur	· Jumlah laporan pertanggungjawaban administratif · Jumlah Regulasi yang disusun · Jumlah sarana dan prasarana yang memenuhi standar · Jumlah penarikan iuran dari Badan Usaha	9 Laporan 2 Regulasi 1 Paket 433 Milyar	51 laporan ^{K)} 10 regulasi ^{K)} 5 paket ^{K)} 444 milyar ^{K)}	307,2 14,5 117,6 47,8
XI	PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA DEWAN ENERGI NASIONAL					312,3
A.	KEGIATAN PRIORITAS BIDANG					120,6
1.	Fasilitasi dalam rangka perumusan Kebijakan Energi Nasional dan penetapan Rencana Umum Energi Nasional, serta Penyelenggaraan persidangan	1. Tersedianya bahan perancangan kebijakan energi; 2. Tersedianya bahan perencanaan energi;	1 Jumlah koordinasi dengan stakeholders dalam penyusunan bahan persidangan kebijakan energi 2 Jumlah kajian untuk perancangan kebijakan energi; 3 Jumlah bahan untuk perancangan kebijakan energi 4 Jumlah persidangan anggota Dewan Energi Nasional yang dilaksanakan 1. Jumlah koordinasi dengan stakeholders dalam penyusunan bahan persidangan perencanaan energi 2. Jumlah kajian untuk perencanaan energi nasional dan daerah; 3. Jumlah bahan penyusunan RUEN 4. Jumlah bahan untuk penelaahan neraca energi; 5. Jumlah bahan evaluasi dan laporan pelaksanaan penyiapan bahan persidangan perencanaan energi.	1 LK 2 LK 3 LK 1 LK 2 LK - 1 LK 1 LK -	5 LK ^{K)} 10 LK ^{K)} 15 LK ^{K)} 5 LK ^{K)} 6 LK ^{K)} 4 LK ^{K)} 5 LK ^{K)} 5 LK ^{K)} 4 LK ^{K)}	5,9 15,3 17,4 6,4 1,4 4,6 5,9 5,4 0,9

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

NO	PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
		3. Terlaksananya tugas urusan hubungan masyarakat, keprotokolan dan persidangan Dewan Energi Nasional	1. Jumlah koordinasi kegiatan hubungan masyarakat dan persidangan	2 LK	10 LK ^{K)}	9,0
			2. Jumlah pelaksanaan keprotokolan dan fasilitas sidang	2 LK	10 LK ^{K)}	8,2
			3. Jumlah pelaksanaan hubungan masyarakat dan kelembagaan	2 LK	10 LK ^{K)}	2,8
			4. Jumlah dokumentasi dan bahan persidangan	1 LK	5 LK ^{K)}	2,5
			5. Jumlah notulen dalam persidangan	1 LK	5 LK ^{K)}	2,3
			6. Jumlah hasil evaluasi dan laporan pelaksanaan hubungan masyarakat, keprotokolan, dan persidangan.	1 LK	5 LK ^{K)}	2,3
2.	Fasilitasi dalam rangka penetapan langkah-langkah penanggulangan krisis dan darurat energi, serta pengawasan pelaksanaan kebijakan energi lintas sektor	1 Meningkatnya data dan informasi dalam rangka meng-identifikasi daerah rawan krisis.	1 Jumlah data dan informasi untuk identifikasi daerah krisis.	6 prov.	33 prov. ^{K)}	6,1
			2 Jumlah data dan informai dalam penyusunan kriteria pedoman penanggulangan krisis dan darurat energi.	1 pkt	5 pkt ^{K)}	5,9
			3 Jumlah data dan informasi dalam penyusunan skenario penanggulangan krisis dan darurat energi.	1 pkt	5 pkt ^{K)}	6,1

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

NO	PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
		2 Meningkatnya pengawasan pelaksanaan kebijakan energi	4 Jumlah laporan pengawasan pelaksanaan KEN.	1 pkt	5 pkt ^{K)}	0,9
			5. Jumlah laporan pengawasan implementasi EBT	1 pkt	5 pkt ^{K)}	2,4
		3 Meningkatnya koordinasi dalam rangka penyusunan perumusan pedoman penanggulangan krisis energi dan darurat energi.	6. Jumlah data dan informasi teknis dalam mendukung pengawasan pelaksanaan kebijakan penyediaan dan pemanfaatan energi	1 pkt	5 pkt ^{K)}	6,1
			7. Penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi.	1 pkt	5 pkt ^{K)}	0,9
			8. Laporan hasil evaluasi Kegiatan fasilitasi penanggulangan krisis dan darurat energi.	--	4 pkt ^{K)}	0,9
			9. Jumlah rapat rapat dalam rangka penyusunan pedoman dan rapat koordinasi evaluasi dalam rangka fasilitasi penanggulangan krisis dan darurat energi.		4 pkt ^{K)}	0,9
TOTAL ALOKASI KEMENTERIAN ESDM 2010-2014						80.821,0

K : Angka kumulatif 5 tahun (2010-2014)

Catatan:

Pagu Ditjen LPE dengan Pengelolaan Listrik dan Pemanfaatan Energi, termasuk tambahan untuk usulan alokasi kegiatan Lisdes EBT sebesar Rp. 10 Triliun dari DAK

**RENCANA TINDAK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH 2010-2014
PER KEMENTERIAN/LEMBAGA**

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

No.	PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil Outcomes/ Output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
II	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN					117.763,7
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT						11.851,0
I	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN TRANSPORTASI DARAT	Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi darat				11.851,0
1	Manajemen & Peningkatan Keselamatan Transportasi Darat	Tersusunnya 100% Road Map to Zero Accident	Rencana Induk Keselamatan Lalu lintas Jalan; Rencana Induk Keselamatan Lalu Lintas SDP	1 Paket	5 Paket ^{*)}	100,4
			Terselenggaranya kegiatan keselamatan transportasi darat (sosialisasi; penyusunan pedoman teknis keselamatan transportasi darat; monitoring & evaluasi keselamatan transportasi darat;)	1 Paket	5 Paket ^{*)}	231,7
2	Pembangunan & Pengelolaan Prasarana dan Fasilitas Lalu Lintas Angkutan Jalan	Tersusunnya 100% Road Map to Zero Accident	Terpasangnya fasilitas keselamatan LLAJ	Marka: guardrail; Rambu Lalu Lintas,RPPJ Tiang F, RPPJ Portal , Traffic Light ; warning light ; delineator; paku jalan ; cermin tikungan ; Rubber Cone ; Rubber Strip , VMS, LPJU dan fasilitas keselamatan LLAJ lainnya	Marka: guardrail; Rambu Lalu Lintas,RPPJ Tiang F, RPPJ Portal , Traffic Light ; warning light ; delineator; paku jalan ; cermin tikungan ; Rubber Cone ; Rubber Strip , VMS, LPJU dan fasilitas keselamatan LLAJ lainnya	1.489,6
			Pembangunan Alat Pengujian Kendaraan Bermotor	11 Mekanis	60 buah mekanis & 20 mobile	167,0

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

No.	PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil Outcomes/ Output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
			Pengembangan Sistem Uji Sertifikasi / Tipe	1 paket	5 Paket ^{ki)}	312,5
			Implementasi Teknologi Lalu Lintas Angkutan Jalan	Paket pengembangan Sistem Informasi Angkutan Jalan 1 Pkt, Prasarana Fasilitas Pengendalian Operasional 1 Paket, RTTMC 1 paket, Stiker Pelayanan Angkutan 1 Paket; Driving Simulator 1 paket; Pengembangan Data & Informasi Perhubungan Darat 1 Paket; Pembangunan Sistem Informasi Perhubungan Darat 1 Paket	Sistem Informasi Angkutan Jalan 5 Pkt, Prasarana Fasilitas Pengendalian Operasional 5 Pkt, RTTMC 5 Pkt, Stiker Pelayanan Angkutan 5 Pkt; Driving Simulator 5 Pkt; Pengemb Data & Informasi Hubdat 5 Pkt; Pembangunan Sistem Informasi Hubdat 5 Pkt ^{ki)}	201,5
			Penataan Manajemen & Rekayasa Lalu Lintas	26 Paket	550 paket ^{ki)}	258,6
			Prasarana LLAJ Daerah/Kawasan Perbatasan	-	250 paket ^{ki)}	13,0
		Terbangunnya Simpul Transportasi Jalan	Jumlah pembangunan terminal transportasi jalan	15 Lokasi	117 Lokasi ^{ki)}	609,6
			Jumlah pembangunan jembatan timbang	-	40 Lokasi ^{ki)}	155,0
		Peningkatan Prasarana/Sarana Angkutan Jalan	Jumlah Rehabilitasi Simpul LLAJ	1 Paket	5 Paket ^{ki)}	200,0
			Jumlah Rehabilitasi Fasilitas Keselamatan LLAJ	-	3 Paket ^{ki)}	21,4
			Jumlah Peningkatan Fasilitas Pendukung LLAJ	-	4 Paket ^{ki)}	5,0
			Kontingensi Bencana Alam	1 Paket	5 Paket ^{ki)}	12,7
			Jumlah Alat Kinerja Angkutan Jalan	-	240 paket ^{ki)}	13,7

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

No.	PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil Outcomes/ Output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
		Pelayanan Keperintisan Angkutan Jalan	Jumlah Lintas Keperintisan Angkutan Jalan yang terlayani	175 lintas	190 lintas	284,9
			Jumlah Bus Perintis	37 unit	577 unit	200,3
			Jumlah Paket Penunjang Operasional Keperintisan	-	240 paket	13,7
3	Pembinaan dan Pengembangan Sistem Transportasi Perkotaan	Tersusunnya 100% rencana dan program sistem transportasi dan evaluasi pelaksanaan program	Jumlah Rencana Induk angkutan perkotaan, rencana induk sistem informasi lalu lintas perkotaan, Laporan evaluasi, Terselenggaranya ATCS, Jumlah Fasilitas Keselamatan Transportasi Perkotaan,	1 Paket	15 Paket	282,5
		Terselenggaranya Transportasi Perkotaan	Jumlah Pengembangan Bus Rapid Transit (BRT), Kota Percontohan, Kawasan Percontohan	1 Paket	5 Paket	379,2
		Transportasi Ramah lingkungan	Jumlah Penyelenggaraan Transportasi Ramah Lingkungan	1 Paket	5 Paket	137,6
4	Pembangunan Sarana & Prasarana Transportasi SDP dan pengelolaan prasarana lalulintas SDP	Terbangunnya prasarana transportasi Sungai Danau & Penyeberangan	Jumlah Prasarana Dermaga Penyeberangan	56 Dermaga	258 Dermaga	2.791,0
			Jumlah Prasarana Dermaga Sungai & Danau	10 Dermaga	236 Dermaga	390,3
			Jumlah Break Water Dermaga Penyeberangan	4 paket	20 paket	351,0
		Terbangunnya Sarana transportasi Sungai Danau & Penyeberangan	Pembangunan Bus Air	4 Unit	18 Unit	51,6
		Terbangunnya Fasilitas Keselamatan transportasi Sungai Danau & Penyeberangan	Jumlah Fasilitas Keselamatan terbangun	6 paket	175 paket	36,2
		Peningkatan Dermaga Penyeberangan	Jumlah Dermaga Penyeberangan yang mengalami peningkatan	5 unit	92 unit	111,5
		Peningkatan Dermaga Sungai Danau	Jumlah Dermaga Sungai Danau yang mengalami peningkatan	14 Paket	58 Paket	68,4
		Peningkatan Rambu Sungai & Danau	Jumlah Rambu Sungai Danau yang mengalami peningkatan	16 lokasi	80 lokasi	78,0
		Peningkatan Alur Pelayaran	Jumlah Alur Pelayaran yang mengalami peningkatan	7 paket	35 paket	200,0
		Pembangunan Sarana Keperintisan	Jumlah Sarana Keperintisan yang mengalami peningkatan	4 Unit	20 unit	1.264,9

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

No.	PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil Outcomes/ Output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
		Pelayanan Keperintisan Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan	Jumlah Lintas Keperintisan Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan yang terlayani	85 Lintas	120 Lintas	775,9
		Terselenggaranya kegiatan penunjang penyelenggaraan SDP	Kegiatan penunjang penyelenggaraan SDP	1 Paket	5 paket ^{ki}	235,6
5	Dukungan Manjemen & Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perhubungan Darat	Terselenggaranya Pemerintahan yang Baik	Terlaksananya kegiatan rutin/tugas pokok dan fungsi	1 Paket	5 paket ^{ki}	406,5
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN						33.792,5
II	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN	Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi perkeretaapian				33.792,5
1	Pembangunan dan pengelolaan bidang keselamatan dan teknik sarana	110 unit kereta ekonomi (termasuk KPM3)	Jumlah lokomotif, KRDE, KRL, KRDE yang dibangun	22 unit	110 unit kereta ekonomi ^{ki}	321,8
		72 paket pengadaan peralatan/fasilitas sarana dan keselamatan perkeretaapian	Jumlah paket pengadaan peralatan/fasilitas sarana dan keselamatan perkeretaapian	11 paket	72 paket pengadaan peralatan/fasilitas sarana dan keselamatan perkeretaapian ^{ki}	391,6
2	Pembangunan dan pengelolaan prasarana dan fasilitas pendukung kereta api	238,65 km jalur KA	Panjang km jalur KA yang direhabilitasi	13,06 km	238,65 km jalur KA ^{ki}	525,7
		53 Jembatan KA	Jumlah unit jembatan KA yang direhabilitasi	-	53 Jembatan KA ^{ki}	123,7
		128 paket peningkatan persinyalan	Jumlah paket pekerjaan peningkatan persinyalan	16 Paket	128 paket peningkatan persinyalan ^{ki}	2.446,6
		49 paket peningkatan telekomunikasi	Jumlah paket pekerjaan peningkatan telekomunikasi	-	49 paket peningkatan telekomunikasi ^{ki}	450,0
		206 unit peningkatan fasilitas pintu perlintasan sebidang	Jumlah unit peningkatan fasilitas pintu perlintasan sebidang	13 unit	206 unit peningkatan fasilitas pintu perlintasan sebidang ^{ki}	359,0
		73 paket Pembangunan/rehabilitasi bangunan operasional	Jumlah paket Pembangunan/rehabilitasi bangunan operasional	19 paket	73 paket Pembangunan/rehabilitasi bangunan operasional ^{ki}	455,8

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

No.	PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil Outcomes/ Output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
3	Pembangunan dan pengelolaan prasarana dan fasilitas pendukung kereta api	1.396,19 km jalur KA	Panjang km jalur KA yang ditingkatkan kondisinya/keandalannya	371,48 km	1.396,19 km jalur KA ^{ki)}	3.234,5
		534,32 km jalur KA	Panjang km jalur KA yang diaktifkan kembali (reaktivasi)	15,00 km	534,32 km jalur KA ^{ki)}	1.791,1
		295 unit jembatan KA	Jumlah unit jembatan KA yang ditingkatkan	67 unit	295 unit jembatan KA ^{ki)}	1.318,0
		954,43 km jalur KA baru/ jalur ganda, termasuk pembangunan MRT dan Monorail	Panjang km jalur KA baru yang dibangun termasuk jalur ganda	68,67 km	954,43 km jalur KA baru/ jalur ganda, termasuk pembangunan MRT dan Monorail ^{ki)}	14.751,7
		2.457 km'sp material rel	Jumlah km'sp pengadaan rel	157 km	2.457 km'sp material rel ^{ki)}	2.847,6
		1.364 unit wesel	Jumlah unit pengadaan wesel	164 unit	1.364 unit wesel ^{ki)}	1.247,5
		71 paket peningkatan pelistrikan (diantaranya elektrifikasi sepanjang 289 km)	Jumlah paket pekerjaan peningkatan pelistrikan	13 Paket	71 paket peningkatan pelistrikan ^{ki)}	2.088,4
		148 paket pengadaan peralatan/fasilitas prasarana perkeretaapian	Jumlah paket pengadaan peralatan/fasilitas prasarana perkeretaapian	14 paket	148 paket pengadaan peralatan/fasilitas prasarana perkeretaapian ^{ki)}	474,9
4	Pembangunan dan pengelolaan bidang keselamatan dan teknis sarana	186 unit Sarana KA (Lokomotif, KRDI, KRDE, KRL, Tram, Railbus)	Jumlah unit pengadaan lokomotif, KRDI, KRDE, KRL, Tram, Railbus	7 paket	186 unit Sarana KA ^{ki)}	880,8
		25 unit modifikasi Sarana KA (KRL menjadi KRDE)	Jumlah unit modifikasi sarana KA	5 unit	25 unit modifikasi Sarana KA ^{ki)}	84,0
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT						33.044,7
III	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN TRANSPORTASI LAUT	Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi laut				33.044,7
1	Pengelolaan dan Penyelenggaraan kegiatan di Bidang Kenavigasian	Terbangunnya sarana bantu navigasi pelayaran terdiri 93 menara suar; 185 rambu suar; 153 pelampung suar;	unit (menara suar; rambu suar; pelampung suar)	18; 23 ; 30	SBNP terdiri 93 menara suar; 185 rambu suar; 153 pelampung suar; ^{ki)}	1.127,6

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

No.	PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil Outcomes/ Output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
		Terbangunnya dan Meningkatnya SBNP di wilayah Indonesia sebanyak 71 tower mensu, 215 unit lampu suar, 50 unit buoy melalui kegiatan Improvement and Development of Indonesia Aids to Navigation	unit (menara suar; lampu suar; bouy)	-	SBNP sebanyak 71 tower mensu, 215 unit lampu suar, 50 unit buoy ^{ki)}	567,8
		Tersedianya 922 unit suku cadang SBNP	unit suku cadang	170	922 unit suku cadang SBNP ^{ki)}	154,0
		Terbangunnya gedung SROP dan sistem telekomunikasi pelayaran sebanyak 188 SROP melalui Maritime Telecommunication System Development Project (Phase IV) IP-520	unit SROP	42	188 SROP ^{ki)}	588,1
		Tersedianya 600 unit perangkat radio	unit Perangkat Radio	200	600 unit radio ^{ki)}	54,0
		Terbangunnya 3 unit receiving station, 18 report sub center; di Selat Sunda and Lombok melalui kegiatan Indonesia Ship Reporting System	PAKET	-	3 VTS	204,0
		Terpasangnya 7 unit VTIS	unit VTIS	3	7 VTS ^{ki)}	59,0
		Terbangunnya 9 VTIS di Selat Malaka - wilayah Tengah melalui Grant JICA	unit VTIS	6	9 VTS ^{ki)}	218,9
		Terbangunnya 4 unit VTS di Selat Malaka Bagian Utara	unit VTIS	-	4 VTS ^{ki)}	288,1
		Terbangunnya 9 unit VTS di Selat Malaka Bagian Selatan	unit VTIS	-	9 VTS ^{ki)}	255,0
		22 unit Suku Cadang SROP	unit	5	22 unit ^{ki)}	44,0
		10 unit CCTV	unit	5	10 unit CCTV ^{ki)}	18,0
		15 unit AIS	unit AIS	7	15 unit AIS ^{ki)}	11,3
		Terbangunnya 7 dermaga kapal kenavigasian	Dermaga	2	7 dermaga ^{ki)}	55,0

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

No.	PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil Outcomes/ Output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
		Tersedianya 15 unit Kapal Inspeksi Navigasi	unit	1	15 unit ^{*)}	120,0
2	Pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan di Bidang Penjagaan Laut dan Pantai	Tersedianya 72 unit kapal patroli KPLP	unit	22	72 unit ^{*)}	900,0
		Terlaksananya retrofit 9 unit kapal patroli	unit	-	9 unit	466,0
		Tersedianya 12 unit kapal patroli cepat	unit	-	12 unit ^{*)}	150,0
3	Pengelolaan dan Penyelenggaraan kegiatan di bidang Perkapalan dan Kepelautan	Tersedianya 29 unit kapal Marine Surveyor	unit	9	29 unit ^{*)}	23,9
4	Pengelolaan dan Penyelenggaraan kegiatan di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Laut	Tersedianya 32 unit kapal perintis	Unit	2	32 unit kapal ^{*)}	1.493,8
		Tersedianya 2 unit kapal penumpang	unit	-	2 unit kapal ^{*)}	1.300,0
		Tersedianya angkutan laut di 17 Provinsi 76 Trayek yang mendapatkan subsidi perintis di wilayah terpencil	Trayek	60	76 trayek	2.135,0
		Terselenggaranya National Single Window pada 14 lokasi	lokasi pelabuhan	1 Lokasi (Kantor Pusat)	14 lokasi ^{*)}	151,0
		Meningkatnya armada niaga pelayaran nasional melalui kegiatan Development of Domestic Shipping Industry Phase I (1 paket)	jumlah kapal niaga		1 Paket	1.200,0
		Tersedianya Master Plan peningkatan perdagangan melalui laut dengan kegiatan Port Development and Logistics in Greater Jakarta Metropolitan Area	laporan master Plan	-	1 Paket	15,0
		Terselenggaranya Cargo Information System	Paket	1	14 Paket ^{*)}	54,0

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

No.	PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil Outcomes/ Output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
		Terwujudnya Tatahan Pelabuhan, Rencana Induk Pelabuhan Nasional, Rencana Induk Pelabuhan, serta Peraturan Perundangan Pelaksanaan	Jumlah Peraturan Perundangan, peraturan pelaksanaan teknis, dan laporan kajian	2	15 (peraturan perundangan, laporan kajian) ^{ki)}	148,0
5	Pengelolaan dan Penyelenggaraan kegiatan di bidang Pelabuhan dan Pengerukan	Terjaganya alur pelayaran melalui pengerukan 61,7 juta m3 sedimen	volume lumpur/sedimen yang dikeruk (juta m3)	6,3	61,7 juta m3 sedimen ^{ki)}	880,0
		Optimalnya fungsi Sarana dan fasilitas 23 pelabuhan strategis Lhoksemawe, Teluk Bayur, Dumai, Pekan Baru, Palembang, Panjang, Batan, Tg.Pinang, Tg.Emas, Tg.Perak, Cigading, Benoa, Kupang, Pontianak, Banjarmasin, Samarinda, Balikpapan, Bitung, Makasar, Sorong, Ambon, Biak dan Jayapura.	Jumlah lokasi yang dibangun dan di rehab	5 Lokasi	23 lokasi ^{ki)}	4.792,0
		Pengembangan Pelabuhan Tanjung Priok	lokasi	-	1 lokasi	1.500,0
		Pengembangan Pelabuhan Belawan-Medan	lokasi	-	1 lokasi	2.000,0
		Meningkatnya kapasitas 125 pelabuhan non perintis	Jumlah pelabuhan yang direhabilitasi/ditingkatkan/dibangun	25 Lokasi	125 lokasi ^{ki)}	1.750,0
		Meningkatnya jumlah dan kapasitas pelabuhan perintis	Jumlah pelabuhan yang direhabilitasi/ditingkatkan/dibangun	30 Lokasi	150 lokasi ^{ki)}	1.750,0

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

No.	PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil Outcomes/ Output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
6	Dukungan Manajemen & Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perhubungan Laut	Terselenggaranya dukungan administrasi dan manajemen	Paket studi, kajian, seminar, sosialisasi dan rapat koordinasi	30 paket	150 paket	8.571,2
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA						19.535,6
IV	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN TRANSPORTASI UDARA					19.535,6
1	Pelayanan Angkutan Udara Perintis	115 rute perintis 19.006 drum BBM	Jumlah rute perintis yang terlayani	118 3.766	115 rute perintis 19.006 drum BBM	892,4 39,7
2	Pengawasan dan Pembinaan Kelaikan Udara dan Pengoperasian Pesawat Udara	2.496 paket 3.170 paket	Jumlah audit Jumlah surveillance	399 496	2.496 paket 3.170 paket	36,4 40,0
		1.170 paket	Jumlah inspection	189	1.170 paket	14,7
3	Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan Prasarana Bandar Udara	205 paket Bandara 28 paket bandara 1 paket bandara	Jumlah bandar udara yang dikembangkan, direhabilitasi Jumlah Bandar udara yang dikembangkan di daerah perbatasan dan rawan bencana Jumlah bandar udara baru yang dibangun	205 4 1	205 paket Bandara 28 paket bandara 1 paket bandara	6.976,3 1.066,1 1.861,7
4	Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan Prasarana Navigasi Penerbangan	412 Paket 53 Unit 304 Set	Jumlah fasilitas navigasi yang dibangun dan yang direhabilitasi	124 13 69	412 Paket 53 Unit 304 Set	1.677,0 398,5 156,0

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

No.	PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil Outcomes/ Output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
5	Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan Prasarana Keamanan Penerbangan	1.423 Paket 522 Unit 1020 Set 57.000 Kg 193.000 Liter	Jumlah fasilitas keamanan yang dibangun dan yang direhabilitasi	473	1.423 Paket	865,3
				165	522 Unit	174,7
				300	1020 Set	12,7
				11000	57.000 Kg	1,2
				48000	193.000 Liter	3,4
6	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Perhubungan Udara	3 unit pesawat udara kalibrasi termasuk console (FIS) kalibrasi	Jumlah pesawat udara kalibrasi termasuk console (FIS) kalibrasi yang dibangun	1	3 unit	443,3
7	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Perhubungan Udara	Terselenggaranya 100% dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya	Jumlah peraturan, rapat dan sosialisasi, evaluasi dan pelaporan, studi, pengawasan, sispro teknis, sertifikasi, diklat, prasarana dan sarana penunjang teknis dan kegiatan penunjang lainnya	973 paket	5314 paket	4.876,1
V	PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA					2.332,4
VI	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN					188,5

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

No.	PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil Outcomes/ Output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
VII	PROGRAM PENINGKATAN PENGAWASAN DAN AKUNTABILITAS APARATUR NEGARA					458,5
VIII	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PERHUBUNGAN					15.938,0
IX	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERHUBUNGAN					622,6
TOTAL ALOKASI KEMENTERIAN PERHUBUNGAN 2010-2014						117.763,7

K : Angka kumulatif 5 tahun (2010-2014)

**RENCANA TINDAK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH 2010-2014
PER KEMENTERIAN/LEMBAGA**

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KEMENDIKNAS	Menguatnya Tata Kelola dan Sistem Pengendalian Manajemen Kementerian Pendidikan Nasional	Persentase mata pelajaran pendidikan dasar dan menengah yang hak cipta buku teksnya telah dibeli (N total= 885 jilid mapel)	52%	100%	7.696,0
		Tersedianya dan Berdayagunanya Buku Ajar, Kebahasaan, Serta Pengembangan Sekolah Sehat, TIK, dan Informasi Pendidikan	Persentase satuan pendidikan formal dan unit kerja terkoneksi ke sistem pembelajaran daring (online)	28%	76%	
1.1	Penyediaan Buku Ajar yang Bermutu dan Murah serta Pembinaan, Pengembangan, Kegrafikaan dan Pendidikan	Tersedianya Buku Ajar yang Bermutu dan Murah	Persentase mata pelajaran SD yang buku teksnya telah dibeli hak ciptanya (total 78 jilid mapel)	100%	100% ^{k)}	610,2
			Persentase mata pelajaran SMP yang buku teksnya telah dibeli hak ciptanya (total 47 jilid mapel)	100%	100% ^{k)}	
			Persentase mata pelajaran SMA yang buku teksnya telah dibeli hak ciptanya (total 93 jilid mapel)	100%	100% ^{k)}	
			Persentase mata pelajaran SMK yang buku teksnya telah dibeli hak ciptanya (total 493 jilid mapel)	52%	100%	
			Persentase mata pelajaran SLB yang buku teksnya telah dibeli hak ciptanya (total 174 jilid mapel)	10%	50%	
1.2	Pengembangan Teknologi Informasi Dan Komunikasi (TIK) Untuk Pendayagunaan e-Pembelajaran Dan e-Administrasi Pada Semua Satuan Pendidikan Dan Satuan Kerja	Tersedianya Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendayagunaan e-Pembelajaran dan e-Administrasi pada Semua Satuan Pendidikan dan Satuan Kerja	Jumlah titik terkoneksi Jardiknas	33.140	200.000	3.088,8
			Jumlah satuan pendidikan yang memanfaatkan e-Pembelajaran	41.020	185.000	
			Jumlah satuan kerja yang memanfaatkan e-Administrasi	34.623	107.939	

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
2	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur KEMENDIKNAS	Menguatnya Sistem Pengendalian Manajemen dan Sistem Pengawasan Internal KEMENDIKNAS	Persentase satker di lingkungan KEMENDIKNAS memiliki SPI	45%	100%	1.201,1
			Persentase penyelesaian temuan audit	73,3%	80,7%	
3	Program Pendidikan Taman Kanak-kanak dan Pendidikan Dasar	Tercapainya Keluasan dan Kemerataan Akses TK/TKLB, SD/SDLB dan SMP/SMPLB Bermutu, dan Relevan dengan Kebutuhan Masyarakat, Berkesetaraan Gender, di Semua Provinsi, Kabupaten dan Kota	APM SD/SDLB	84,65%	85,36%	119.769,6
			APM SMP/SMPLB	59,46%	61,07%	
			APK TK/TKLB	30,60%	36,6%	
			APK SD/SDLB	103,76%	105,44%	
			APK SMP/SMPLB	79,98%	88,59%	
			APS usia 7-12 tahun	97,90%	>99%	
			APS usia 13-15 tahun	87,90%	>95%	
			Jumlah siswa SD/SDLB sasaran BOS	27.672.820	28.211.000	
			Jumlah siswa SMP/SMPLB sasaran BOS	9.660.639	10.870.000	
			Jumlah siswa SD/SDLB sasaran beasiswa miskin	2.767.282	3.103.210	
			Jumlah siswa SMP/SMPLB sasaran beasiswa miskin	966.064	1.195.700	
			Persentase SD menerapkan e-Pembelajaran	16%	40%	
			Persentase SMP yang menerapkan pembelajaran dengan pendekatan CTL berbasis TIK	21,40%	75,00%	
			Persentase TK berakreditasi	55,6%	85,0%	
			Persentase SD/SDLB berakreditasi minimal B	9,60%	15,00%	
			Persentase SMP/SMPLB berakreditasi minimal B	20,60%	27,00%	
			Persentase peserta didik SD/SDLB putus sekolah	1,5%	0,7%	
			Persentase peserta didik SMP/SMPLB putus sekolah	1,80%	1,00%	
			Rasio APK peserta didik TK/TKLB perempuan: laki-laki	>0,98	1	
Rasio APM peserta didik perempuan: laki-laki pada SD/SDLB	>0,98	1				

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
			Rasio APM peserta didik perempuan:laki-laki pada SMP/SMPLB	>0,97	1	
			Persentase SD memiliki perpustakaan	43,20%	85,00%	
			Persentase SMP yang memiliki lab. MIPA	77,50%	97,50%	
			Persentase SMP yang memiliki perpustakaan	83,60%	100,00%	
3.1	Penyediaan Layanan Pendidikan TK	Tercapainya Keluasan dan Kemerataan Akses TK Bermutu dan Berkesetaraan Gender di Semua Kabupaten dan Kota	APK TK/TKLB	30,60%	36,60%	2.322,4
			Persentase TK berakreditasi	55,60%	85,00%	
			Rasio APK peserta didik TK/TKLB perempuan: laki-laki	>0,98	1	
3.2	Penjaminan Kepastian Layanan Pendidikan SD	Tercapainya Keluasan dan Kemerataan Akses SD Bermutu dan Berkesetaraan Gender di Semua Kabupaten dan Kota	APM SD/SDLB	84,65%	85,36%	11.633,4
			APK SD/SDLB	103,76%	105,44%	
			Provinsi ber-APM > 83,57%	82,50%	85,00%	
			Persentase SD memiliki sarana komputer	28%	90%	
			Persentase SD menerapkan e-Pembelajaran	16%	40%	
			Persentase SD yang memiliki fasilitas internet	10%	30%	
			Persentase SD/SDLB berakreditasi minimal B	9,60%	15,00%	
			Persentase peserta didik SD putus sekolah	1,50%	0,70%	
			Rasio APM peserta didik perempuan: laki-laki pada SD/SDLB	>0,98	1	
			Persentase SD memiliki perpustakaan	43,20%	85%	
			Persentase SD melaksanakan MBS dengan baik	55%	90%	
3.3	Penyediaan subsidi Pendidikan SD/SDLB berkualitas	Tersalurkannya subsidi pendidikan bagi siswa SD/SDLB	Jumlah siswa SD/SDLB sasaran BOS	27.672.820	28.211.000	59.599,1
			Jumlah siswa SD/SDLB sasaran beasiswa miskin	2.767.282	3.103.210	

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
3.4	Penjaminan Kepastian Pendidikan SMP	Tercapainya Keluasan dan pemerataan Akses SMP Bermutu dan Berkesetaraan Gender di Semua Kabupaten dan Kota	APM SMP/SMPLB	59,46%	61,07%	12.684,6
			APK SMP/SMPLB	79,98%	88,59%	
			Provinsi ber-APM > 58,17%	20,42%	90,00%	
			Persentase SMP yang menerapkan pembelajaran dengan pendekatan CTL berbasis TIK	21,40%	75,00%	
			Persentase SMP yang memiliki lab. Komputer	45,50%	73,70%	
			Persentase SMP/SMPLB berakreditasi minimal B	20,60%	27,00%	
			Persentase peserta didik SMP putus sekolah	1,80%	1,00%	
			Rasio APM peserta didik perempuan:laki-laki pada SMP/SMPLB	>0,97	1	
			Rata-rata nasional nilai UN SMP	7	7	
			Perolehan medali dalam IJSO (emas; perak; perunggu)	2;5;2	14;26;15 ^{k)}	
			Persentase SMP yang memiliki ruang dan alat lab. Bahasa	21,30%	70,90%	
			Persentase SMP yang memiliki lab. MIPA	77,50%	97,50%	
			Persentase SMP yang memiliki perpustakaan	83,60%	100,00%	
3.5	Penyediaan subsidi Pendidikan SMP/SMPLB berkualitas	Tersalurkannya subsidi pendidikan bagi siswa SMP/SMPLB	Jumlah siswa SMP/SMPLB sasaran BOS	9.660.639	10.870.000	31.512,3
			Jumlah siswa SMP/SMPLB sasaran beasiswa miskin	966.064	1.195.700	
3.6	Peningkatan Akses dan Mutu PK dan PLK	Tercapainya Perluasan dan Pemerataan Akses Pendidikan PK dan PLK yang Bermutu, Berkesetaraan Gender, dan Relevan dengan Kebutuhan Masyarakat, di Semua Kabupaten dan Kota	Persentase anak cacat tertampung pada TKLB dan SDLB	29,60%	34,40%	697,3
			Persentase peserta didik SDLB putus sekolah	1,50%	0,70%	
			Persentase anak kebutuhan khusus yang tertampung pada pendidikan SD PLK	1,40%	3,10%	
			Persentase anak luar biasa tertampung pada SMPKH/SMPLB	15,70%	18,90%	
		Persentase anak kebutuhan khusus yang tertampung pada pendidikan SMP PLK	2,20%	6,60%		

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
			Persentase anak kebutuhan khusus yang tertampung pada pendidikan TK pendidikan layanan khusus (TK PLK).	3,30%	7,30%	
			Jumlah anak berkebutuhan khusus (ABK) yang menerima beasiswa penyelenggaraan pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus	99.754	100.154	
			Jumlah SLB (SDLB dan SMPLB) yang memiliki perpustakaan (e-Perpustakaan)	75	145	
3.7	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pendidikan TK dan Pendidikan Dasar	Menguatnya tata kelola dan sistem pengendalian manajemen di Ditjen MPDM	Persentase satker yang telah menerapkan sistem penilaian berbasis kinerja	45%	100%	1.319,6
			Persentase satker menerapkan e-Pengadaan > 50% Paket PBJ	5%	75%	
			Persentase komite sekolah yang berfungsi efektif	75%	95%	
			Peran serta masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pendanaan pendidikan melalui dewan pendidikan	meningkat	meningkat	
4	Program Pendidikan Menengah	Tercapainya Keluasan dan Kemerataan Akses SMA/SMLB/SMK Bermutu, dan Relevan dengan Kebutuhan Masyarakat, Berkesetaraan Gender, di Semua Provinsi, Kabupaten dan Kota	APK SMA/SMLB/SMK	65,60%	76,40%	16.918,3
			Jumlah siswa SMK penerima BOMM	3.000.000	3.400.000	
			Jumlah siswa SMA penerima BOMM	2.700.000	3.100.000	
			Jumlah siswa SMK sasaran beasiswa miskin	305.535	645.298	
			Jumlah siswa SMA sasaran beasiswa miskin	378.783	800.000	
			Persentase SMK menerapkan pembelajaran berpusat pada peserta didik yang kontekstual berbasis TIK	50%	100%	
			Persentase SMA yang menerapkan pembelajaran berpusat pada peserta didik yang kontekstual berbasis TIK	40,00%	80,00%	
			Persentase SMK bersertifikat ISO 9001:2000/ 9001:2008	25,60%	100,00%	
			Jumlah SMA/SMLB bersertifikat ISO 9001:2008	316	1.500	

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
			Persentase SMK berakreditasi minimal B.	22%	30%	
			Persentase SMA berakreditasi minimal B	23,40%	40,00%	
			Persentase lulusan SMK yang bekerja pada tahun ke-2 kelulusan	39%	52%	
			Rasio APK peserta didik perempuan:laki-laki pada SMA/SMK/SMLB	>0,80	1	
			Persentase SMA/SMLB yang memiliki e-Perpustakaan	10,00%	30,00%	
			Persentase SMA/SMLB yang memiliki laboratorium fisika, kimia, dan biologi.	50,9%	100%	
			Persentase SMA/SMLB yang memiliki laboratorium multimedia	10,00%	75,00%	
			Persentase kab/kota memiliki SMA berbasis keunggulan lokal	12,0%	40,0%	
			Persentase SMK memiliki perpustakaan yang berbasis multimedia.	20%	100%	
			Persentase SMK memiliki bengkel kerja sesuai dengan standar sarana prasarana SMK	68%	100%	
			Persentase SMK memiliki laboratorium sains yang relevan sesuai standard sarana prasarana SMK	47%	100%	
			Persentase SMK memiliki laboratorium bahasa sesuai standard sarana prasarana SMK	54,4%	100%	
			Persentase SMK memiliki laboratorium multimedia sesuai standard sarana prasarana SMK	70%	100%	

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
4.1	Penyediaan dan Peningkatan Pendidikan	Tercapainya Perluasan dan Pemerataan Akses Pendidikan SMK Bermutu, Berkesetaraan Gender, dan Relevan dengan Kebutuhan Masyarakat, di Semua Kabupaten dan Kota	APK SMK	30,06%	35,56%	9.242,9
			Provinsi ber-APK > 32,88%	32,54%	90,00%	
			Jumlah siswa SMK penerima BOMM	3.000.000	3.400.000	
			Jumlah siswa SMK sasaran beasiswa miskin	305.535	645.298	
			Persentase SMK menerapkan pembelajaran berpusat pada peserta didik yang kontekstual berbasis TIK	50%	100%	
			Persentase SMK bersertifikat ISO 9001:2000/ 9001:2008	25,60%	100,00%	
			Persentase SMK berakreditasi minimal B.	22%	30%	
			Persentase lulusan SMK yang bekerja pada tahun ke-2 kelulusan	39%	52%	
			Persentase SMK memiliki perpustakaan dengan koleksi buku yang memadai	20%	100%	
			Persentase SMK memiliki perpustakaan yang berbasis multimedia.	20%	100%	
			Persentase SMK memiliki bengkel kerja sesuai dengan standar sarana prasarana SMK	68%	100%	
			Persentase SMK memiliki laboratorium sains yang relevan sesuai standard sarana prasarana SMK	47%	100%	
			Persentase SMK memiliki laboratorium bahasa sesuai standard sarana prasarana SMK	54,4%	100%	
			Persentase lulusan SMK bersertifikat kompetensi	82%	92%	
Persentase SMK memiliki laboratorium multimedia sesuai standard sarana prasarana SMK	70,40%	100%				

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
			Jumlah medali dari kompetisi internasional	4	5	
			Persentase SMK berpasangan dengan minimal 1 (satu) perusahaan yang relevan	65%	100%	
			Persentase SMK menerapkan konsep pendidikan untuk pengembangan yang berkelanjutan <i>Education For Sustainable Development (EFSD)</i>	50%	100%	
4.2	Penyediaan dan Peningkatan Pendidikan SMA	Tercapainya Perluasan dan Pemerataan Akses Pendidikan SMA Bermutu, Berkesetaraan Gender, dan Relevan dengan Kebutuhan Masyarakat, di Semua Kabupaten dan Kota	APK SMA/SMLB nasional	35,59%	40,88%	6.530,5
			Provinsi ber-APK > 37,79%	54,36%	90,00%	
			Jumlah siswa SMA penerima BOMM	2.700.000	3.100.000	
			Jumlah siswa SMA sasaran beasiswa miskin	378.783	800.000	
			Persentase SMA yang menerapkan pembelajaran berpusat pada peserta didik yang kontekstual berbasis TIK	40,00%	80,00%	
			Jumlah SMA bersertifikat ISO 9001:2008	316	1.500	
			Persentase SMA berakreditasi minimal B	23,40%	40,00%	
			Rasio APK peserta didik perempuan:laki-laki pada SMA/SMK/SMLB	>0,80	1	
			Persentase kab./kota memiliki SMA berkeunggulan lokal	12,00%	40,00%	
			Persentase SMA memiliki perpustakaan	80,60%	100,00%	
			Persentase SMA memiliki e-Perpustakaan	10,00%	30,00%	
			Persentase SMA memiliki lab. MIPA (kimia, fisika, biologi)	50,90%	100,00%	
			Persentase SMA memiliki lab. Komputer	60,20%	100,00%	
			Persentase SMA memiliki lab. Multimedia	20,70%	80,00%	
			Rasio komputer pembelajaran terhadap jumlah siswa	60	20	

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
			Persentase SMA menerapkan pembelajaran berwawasan kebangsaan, lingkungan hidup, dan kesehatan sekolah	60,00%	100,00%	
			Perolehan medali emas pada kompetisi internasional	22	103 ^{k)}	
4.3	Peningkatan Akses dan Mutu PK dan PLK	Tercapainya Perluasan dan Pemerataan Akses Pendidikan SMLB/SMA Inklusif dan SMA PLK Bermutu, Berkesetaraan Gender, dan Relevan dengan Kebutuhan Masyarakat, di Semua Kabupaten dan Kota	Persentase anak cacat tertampung pada SMAKH/SMLB	7,41%	11%	579,3
			Persentase anak kebutuhan khusus yang tertampung pada SMA PLK	2,20%	6,90%	
			Jumlah SMLB penyelenggara e-Learning	37	57	
4.4	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Program Pendidikan Menengah	Menguatnya tata kelola dan sistem pengendalian manajemen di Ditjen MPDM	Persentase satker yang telah menerapkan sistem penilaian berbasis kinerja	45%	100%	565,5
			Persentase satker menerapkan e-Kuangan	100%	100%	
			Persentase satker menerapkan e-Pengadaan > 50% Paket PBJ	5%	75%	
5	Program Pendidikan Tinggi	Tercapainya Keluasan dan Kemerataan Akses Pendidikan Tinggi Bermutu, Berdaya Saing Internasional, Berkesetaraan Gender dan Relevan dengan Kebutuhan Bangsa dan Negara	APK PT usia 19-23 tahun	21,91%	26,50%	110.645,8
			Rasio APK peserta didik perempuan:laki-laki di PT	1,12	1,04	
			Jumlah mahasiswa penerima beasiswa miskin	65.000	70.000	
			Jumlah beasiswa bagi mahasiswa lulusan SMA/SMK berprestasi	20.000	20.000	
			Persentase PTN/BHMN menjadi BHPP	30%	100%	
			Persentase PTS menjadi BHPM	10%	75%	
			Persentase PTN bersertifikat ISO 9001:2008	33%	100%	
			Persentase PTS bersertifikat ISO 9001:2008	15%	50%	
			Persentase prodi PT berakreditasi minimal B	67,80%	80,00%	
			Jumlah prodi berakreditasi internasional	3	23 ^{k)}	

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
			Jumlah PT 300 terbaik dunia versi THES	1	3	
			Jumlah PT 500 terbaik dunia versi THES	4	11	
			Jumlah PT 200 terbaik asia versi THES	8	12	
			Jumlah PT masuk dalam QS Star 1-2	14	50	
			Jumlah PT masuk dalam QS Star 3-5	6	25	
			Persentase dosen program S1/diploma berkualifikasi minimal S2	62,5%	90,0%	
			Persentase dosen program pasca berkualifikasi S3	60,0%	90,0%	
			Persentase dosen PT bersertifikat	23,0%	75,0%	
			Persentase PT yang memberikan akses internet dan e- <i>journal</i>	35,0%	75,0%	
			Persentase dosen dengan publikasi nasional	14,8%	50,0%	
			Persentase dosen pasca dengan publikasi internasional	1,20%	6,50%	
			Jumlah HAKI yang dihasilkan	75	150	
5.1	Penyediaan Layanan Akademik Program Studi	Tersedianya Prodi yang Bermutu, Berdaya Saing Internasional, dan Relevan	APK PT usia 19-23 thn *)	21,91%	26,50%	
			Jumlah program studi baru per tahun	500	2.000 ^{k)}	
			Rasio APK peserta didik perempuan/laki-laki di PT	1,12	1,04	
			Persentase prodi PT berakreditasi	73,70%	90%	
			Persentase prodi vokasi berakreditasi minimal B	22,00%	30,67%	
			Persentase prodi profesi berakreditasi minimal B	0,43%	0,59%	
			Persentase prodi akademik berakreditasi minimal B	43,27%	58,72%	
			Jumlah prodi berakreditasi internasional	3	23 ^{k)}	
			Jumlah lab sains yang bersertifikat ISO 17025	10	50	
			Jumlah PT 200 terbaik asia versi THES	8	12	
			Jumlah PT 300 terbaik dunia versi THES	1	3	

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
			Jumlah PT 500 terbaik dunia versi THES	4	11	
			Jumlah PT berperingkat top 1000 versi webometrics	3	5	
			Jumlah PT berperingkat top 1000-4000 versi webometrics	24	30	
			Jumlah prodi yang mengimplementasikan KBK	178	500	
5.2	Penyediaan Dosen dan Tenaga Kependidikan Bermutu	Tersedianya Dosen yang Bermutu dan Berdaya Saing Internasional	Persentase dosen PTN/BHPP program S1/diploma yang berkualifikasi S2/SP1	73,00%	100,00%	15.211,6
			Persentase dosen PTS/BHPM program S1/diploma yang berkualifikasi S2/SP1	45,00%	85,00%	
			Persentase dosen PTN/BHPP program pascasarjana/spesialis yang berkualifikasi S3/SP2	68,00%	90,00%	
			Persentase dosen PTS/BHPM program pascasarjana/spesialis yang berkualifikasi S3/SP2	48,00%	85,00%	
			Persentase dosen PTN/BHPP bersertifikat	35,00%	100,00%	
			Persentase dosen PTS/BHPM bersertifikat	20,00%	90,00%	
			Persentase mahasiswa S3 dalam negeri yang melaksanakan <i>sandwich</i> ke luar negeri	11%	25%	
			Persentase dosen yang melaksanakan <i>academic recharging</i> (dalam dan luar negeri)	0,40%	0,80%	
			Jumlah mahasiswa penerima beasiswa miskin	65.000	70.000	
5.3	Penyediaan Layanan Kelembagaan	Tersedianya Keluasan dan Kemerataan Akses PT yang Bermutu dan Berdaya saing Internasional	Jumlah beasiswa bagi mahasiswa lulusan SMA/SMK berprestasi	20.000	20.000	5.211,3
			Jumlah PT masuk dalam QS Star 1-2	14	50	
			Jumlah PT masuk dalam QS Star 3-5	6	25	
			Persentase PTN/BHMN menjadi BHPP	30%	100%	
			Persentase PTS menjadi BHP penyelenggara/BHPM	10%	75%	
			Jumlah mahasiswa peraih medali dalam olimpiade sains yang menerima beasiswa	60	70	

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
			Jumlah PT mengembangkan kerjasama kelembagaan dalam dan luar negeri	40	72	
5.4	Pengembangan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat	Tersedianya Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat	Persentase dosen melakukan penelitian	35%	55%	3.303,9
			Persentase dosen dengan publikasi nasional	14,8%	50,0%	
			Persentase dosen pasca dengan publikasi internasional	1,20%	6,50%	
			Jumlah HAKI yang dihasilkan	75	150	
			Persentase PT yang memberikan akses internet dan e-journal	35%	75%	
			Persentase dosen yang melakukan pengabdian masyarakat	5%	9%	
			Jumlah PT yang mempunyai inkubator bisnis/industri	15	25	
			Persentase PT yang mempunyai kerjasama dengan industri berbasis penelitian dan pengembangan	1%	5%	
			Persentase PT yang mempunyai kerjasama dengan pemerintah dan pemerintah daerah berbasis penelitian dan kebijakan	1%	8%	
			Persentase mahasiswa yang melaksanakan program kreativitas mahasiswa	1,00%	5,00%	
5.5	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Dikti	Menguatnya tata kelola dan sistem pengendalian manajemen di Ditjen Dikti	Persentase satker yang telah menerapkan sistem penilaian berbasis kinerja	45%	100%	70.839,9
			Persentase satker menerapkan e-Kuangan	100%	100%	
			Persentase satker menerapkan e-Pengadaan > 50% Paket PBJ	5%	75%	
			Persentase PT BHMN bersertifikat ISO 9001:2008	100%	100%	
		Menguatnya tata kelola dan sistem pengendalian di lingkungan Ditjen Dikti dan di Perguruan Tinggi (PT)	Persentase PTN (institut/universitas/sekolah tinggi) bersertifikat ISO 9001:2008	28,6%	100,0%	
			Persentase politeknik negeri bersertifikat ISO 9001:2008	25,9%	100,0%	
			Persentase PTS (institut/universitas/sekolah tinggi) bersertifikat ISO 9001:2008	17,9%	52,9%	

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
			Persentase PTS (politeknik/akademi) bersertifikat ISO 9001:2008	10,7%	45,7%	
6	Program Pendidikan Nonformal dan Informal	Terciptanya Keluasan dan pemerataan Akses PAUD Non Formal, Pendidikan Kesetaraan, dan Orang Dewasa Bermutu dan Berkesetaraan Gender di Semua Provinsi, Kabupaten dan Kota	Persentase buta aksara usia \geq 15 tahun	5,44%	4,18%	15.441,0
			APK PAUD non formal	11,31%	13,83%	
			APK Paket A	0,56%	0,57%	
			APK Paket B	3,75%	3,75%	
			APK Paket C	1,99%	2,22%	
			Persentase satuan PAUD nonformal berakreditasi	0,0%	15,0%	
			Disparitas gender penduduk berkeaksaraan usia \geq 15 tahun	3,00%	2,00%	
			Persentase kab/kota yang memiliki SKB	78,9%	90,0%	
			Persentase kecamatan yang telah memiliki PKBM	48,0%	80,0%	
			Persentase kecamatan yang telah memiliki TBM	48,0%	80,0%	
			Persentase kab/ kota yang telah menerapkan pengarusutamaan gender bidang pendidikan	14,0%	50,0%	
			Persentase kab/kota yang telah menyelenggarakan <i>parenting education</i>	0%	50%	
6.1	Penyediaan Layanan PAUD Nonformal	Terciptanya Keluasan dan pemerataan Akses PAUD Non Formal Bermutu dan Berkesetaraan Gender di Kabupaten dan Kota	APK PAUD nonformal	11,31%	13,83%	5.761,3
			Persentase PAUD non formal berakreditasi	-	15%	
6.2	Penyediaan Layanan Pendidikan Kesetaraan	Terciptanya Perluasan dan pemerataan akses pendidikan kesetaraan Paket A, Paket B, Paket C dan bagi orang Dewasa bermutu, berkesetaraan gender dan relevan dengan kebutuhan masyarakat di semua kabupaten/kota untuk bekerja pada dunia usaha dan dunia industri terkait dan atau	APK Paket A	0,56%	0,57%	4.147,6
			APK Paket B	3,75%	3,75%	
			APK Paket C	1,99%	2,22%	
			Persentase peserta didik Paket A dari putus sekolah SD/MI	1,93%	1,69%	

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
		usaha mandiri (wirausaha)	Persentase peserta didik Paket B dari putus sekolah SMP/MTs	1,93%	1,69%	
			Persentase peserta didik Paket C dari putus sekolah SMA/SMK/MA	1,93%	1,69%	
			Persentase program Paket A yang berakreditasi minimal B	0%	40%	
			Persentase program Paket B yang berakreditasi minimal B	0%	40%	
			Persentase Paket C kejuruan berakreditasi minimal B	0%	25%	
			Persentase program Paket C yang berakreditasi minimal B	5%	50%	
			Rasio jumlah peserta didik orang dewasa laki-laki:perempuan menurut kabupaten/kota	0,7	0,7	
6.3	Penyediaan Layanan Pendidikan Masyarakat	Meningkatnya tingkat literasi yang berkesetaraan Gender di Kabupaten dan Kota	Persentase buta aksara usia ≥ 15 tahun	5,44%	4,18%	2.182,2
			Persentase provinsi dengan tingkat buta aksara $< 4,2\%$	74,8%	95,0%	
			Jumlah penduduk usia ≥ 15 tahun yang menjadi sasaran pengentasan buta aksara	9.078.444	7.353.450	
			Disparitas gender penduduk berkeaksaraan usia ≥ 15 tahun	3,0%	2,0%	
			Persentase kab/kota yang telah menyelenggarakan <i>parenting education</i>	0,0%	50,0%	
			Persentase kab/ kota yang memiliki SKB	78,9%	90,0%	
			Persentase kecamatan yang memiliki PKBM	48,0%	80,0%	
			Persentase pemegang sukma penempuh PKH	5,0%	20,0%	
			Persentase penduduk perempuan berkeaksaraan dasar yang memperoleh layanan kecakapan hidup	7,0%	20,0%	
			Persentase kecamatan yang telah memiliki TBM	48,0%	80,0%	
			Persentase kab/ kota yang telah menerapkan pengarusutamaan gender bidang pendidikan	14,0%	50,0%	

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
			Persentase kabupaten/kota memiliki 10 PKBM	48,0%	80,0%	
			Persentase PKBM berakreditasi	5,0%	25,0%	
6.4	Penyelenggaraan Kursus dan Pelatihan	Terciptanya Perluasan dan Pemerataan Akses Kursus dan pendidikan <i>life skill</i> Bermutu, Berkesetaraan Gender, dan Relevan dengan Kebutuhan Masyarakat, di Semua Kabupaten/ Kota	Persentase anak putus sekolah dan lulus sekolah menengah tidak melanjutkan mendapatkan layanan pendidikan keterampilan berbasis kecakapan hidup, bersertifikat dan bekerja	5%	30%	1.847,1
			Jumlah peserta didik kursus dan warga masyarakat yang mengikuti uji kompetensi	65.000	380.000 ^{k)}	
			Persentase lembaga kursus dan pelatihan berakreditasi	6%	30%	
			Persentase jenis keterampilan/keahlian yang dapat dilayani uji kompetensi oleh lembaga sertifikasi kompetensi (LSK)	10%	30%	
			Persentase lulusan PKH bersertifikat kompetensi	5%	25%	
			Jumlah lembaga sertifikasi kompetensi (LSK) yang dibentuk	20	40	
			Persentase lulusan lembaga kursus pelatihan (LKP) bekerja atau usaha mandiri	60%	77%	
6.5	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pendidikan Nonformal dan Informal	Menguatnya tata kelola dan sistem pengendalian manajemen di Ditjen PNFI	Persentase satker yang telah menerapkan sistem penilaian berbasis kinerja	45%	100%	1.503,4
			Persentase satker menerapkan e-Kuangan	100%	100%	
			Persentase satker menerapkan e-Pengadaan > 50% Paket PBJ	5%	75%	
		Meningkatnya kemampuan/kapasitas dan mutu dukungan teknis Ditjen PNFI dan UPT/Balai	Jumlah Model Program Pembelajaran PNFI	16	96 ^{k)}	
			Jumlah Direktorat dan UPT Ditjen PNFI bersertifikat ISO 9001-2008	-	13	
7	Program Peningkatan Mutu dan Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Tersedianya Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Bermutu yang merata di Provinsi, Kabupaten dan Kota	Persentase guru SD/SDLB berkualifikasi akademik S1/D4	35,60%	88,00%	86.992,6
			Persentase guru SMP/SMPLB berkualifikasi akademik S1/D4	77,10%	98,00%	

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
			Persentase guru SMA/SMLB berkualifikasi akademik S1/D4	92,20%	98,00%	
			Persentase guru SMK berkualifikasi akademik S1/D4	87,60%	98,00%	
			Persentase guru SD/SDLB bersertifikat pendidik	26,30%	80,00%	
			Persentase guru SMP/SMPLB bersertifikat pendidik	44,00%	90,00%	
			Persentase guru SMA/SMLB bersertifikat pendidik	51,00%	90,00%	
			Persentase guru SMK bersertifikat pendidik	44,00%	90,00%	
			Persentase guru SMK bersertifikat kompetensi	18,00%	30,00%	
			Persentase guru SD/SDLB mengikuti PPB	25,30%	80,00%	
			Persentase tutor Paket A mengikuti PPB	15,80%	55,00%	
			Persentase kepala SD/SDLB mengikuti PPB menurut kab/kota	10%	90%	
			Persentase pengawas SD/SDLB mengikuti PPB menurut kab/kota	10%	95%	
			Persentase guru SMP/SMPLB mengikuti PPB	44,00%	90,00%	
			Persentase tutor Paket B mengikuti PPB	16,60%	55,00%	
			Persentase kepala SMP/SMPLB mengikuti PPB menurut kab/kota	10%	90%	
			Persentase pengawas SMP/SMPLB mengikuti PPB menurut kab/kota	10%	90%	
			Persentase guru SMA /SMLB yang mengikuti PPB	51,00%	90,00%	
			Persentase tutor Paket C yang mengikuti PPB	14,00%	50,00%	
			Persentase kepala SMA/SMLB mengikuti PPB menurut kab/kota	10%	90%	
			Persentase pengawas SMA/SMLB mengikuti PPB menurut kab/kota	10%	90%	
			Persentase guru SMK yang mengikuti PPB	44,00%	90,00%	

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
			Persentase kepala SMK mengikuti PPB menurut kab/kota	10%	90%	
			Persentase pengawas SMK mengikuti PPB menurut kab/kota	10%	95%	
			Persentase tutor Paket C kejuruan yang mengikuti PPB	0,00%	25,00%	
			Persentase guru inti yang mengikuti peningkatan kompetensi dan profesionalisme di berbagai bidang	20%	100%	
			Persentase tutor pendidikan keaksaraan mengikuti PPB	38%	70%	
			Persentase pendidik kursus mengikuti diklat kompetensi	19%	55%	
			Persentase pamong belajar mengikuti PPB	52%	60%	
			Persentase penilik yang mengikuti PPB	47%	55%	
			Persentase tenaga kependidikan satuan pendidikan non formal yang mengikuti diklat kompetensi	8%	21%	
7.1	Penyediaan Guru untuk Seluruh Jenjang Pendidikan	Tersedianya Guru Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah yang Bermutu yang merata antar Provinsi, Kabupaten dan Kota	Persentase guru SD/SDLB berkualifikasi akademik S1/D4	35,60%	88,00%	65.101,5
			Persentase guru SMP/SMPLB berkualifikasi akademik S1/D4	77,10%	98,00%	
			Persentase guru SMA/SMALB berkualifikasi akademik S1/D4	92,20%	98,00%	
			Persentase guru SMK berkualifikasi akademik S1/D4	87,60%	98,00%	

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
			Persentase guru SD/SDLB bersertifikat pendidik	26,30%	80,00%	
			Persentase guru SMP/SMPLB bersertifikat pendidik	44,00%	90,00%	
			Persentase guru SMA/SMALB bersertifikat pendidik	51,00%	90,00%	
			Persentase guru SMK bersertifikat pendidik	44,00%	90,00%	
			Persentase guru SMK bersertifikat kompetensi	18,00%	30,00%	
			Rasio guru perempuan:laki-laki yang bersertifikat pendidik	60,00%	95,00%	
			Jumlah guru SD/SDLB penerima tunjangan profesi	120.000	816.167	
			Jumlah guru SMP yang menerima tunjangan profesi	75.000	369.496	
			Jumlah guru SMA yang menerima tunjangan profesi	75.000	194.766	
			Jumlah guru SMK yang memperoleh tunjangan profesi	45.000	178.774	
			Persentase guru SD/SDLB mengikuti PPB	25,30%	85,00%	
			Persentase guru SMP/SMPLB mengikuti PPB	44,00%	90,00%	
			Persentase guru SMA /SMALB yang mengikuti PPB	51,00%	90,00%	
			Persentase guru SMK yang mengikuti PPB	44,00%	90,00%	
			Persentase kab/kota yang telah memiliki rasio pendidik dan peserta didik TK 1:24	1,50%	6,50%	
			Persentase kab/kota yang telah memiliki rasio pendidik dan peserta didik SD 1:32	48,00%	100,00%	
			Persentase kab/kota yang telah memiliki rasio pendidik dan peserta didik SMP 1:40	47,40%	100,00%	
			Persentase kab/kota yang telah memiliki rasio pendidik dan peserta didik SMA 1:40	21,70%	34,30%	
			Persentase kab/kota yang telah memiliki rasio pendidik dan peserta didik SMK 1:40	38,70%	51,40%	
			Jumlah guru yang menerima tunjangan khusus	30.000	30.000	

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
7.2	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Non Formal	Tersedianya Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD non formal, Paket B, Paket B, Paket C dan	Persentase tutor pendidikan keaksaraan berkualifikasi S1/D4	60%	100%	974,3
			Persentase penilik berkualifikasi S1/D4	48%	70%	
			Persentase tutor PAUD non formal mengikuti pendidikan profesi berkelanjutan (PPB)	15,00%	55,00%	
			Persentase tutor Paket A mengikuti pendidikan profesional berkelanjutan	15,80%	55,00%	
			Persentase tutor Paket B mengikuti pendidikan profesional berkelanjutan	16,60%	55%	
			Persentase tutor Paket C mengikuti pendidikan profesi berkelanjutan (PPB)	14%	50%	
			Persentase tutor Paket C kejuruan mengikuti pendidikan profesional berkelanjutan (PPB)	0%	25%	
			Persentase tutor pendidikan keaksaraan mengikuti pendidikan profesi berkelanjutan (PPB)	38%	70%	
			Persentase pamong belajar mengikuti pendidikan profesi berkelanjutan (PPB)	19%	55%	
			Persentase penilik mengikuti pendidikan profesi berkelanjutan (PPB)	15%	55%	
			Rasio tutor dan peserta didik Paket A	2:20	2:20	
			Rasio tutor dan peserta didik Paket B	7:30	7:30	
			Rasio tutor dan peserta didik Paket C	7:40	7:40	
			Rasio jumlah tutor pendidikan keaksaraan dan peserta didik	1:25	1:20	
			Persentase pendidik kursus mengikuti diklat kompetensi	19%	55%	
Rasio jumlah tutor pendidikan keaksaraan dan peserta didik	1:25	1:20				
7.3	Peningkatan mutu dan Pembinaan lembaga diklat dan penjaminan mutu	Meningkatnya Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan TK, PAUD, SD, SMP,	Jumlah pengembangan standar, sistem, program, bahan dan model diklat bagi guru per tahun	20	100 ^{k)}	1.051,2

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
	pendidikan	SMA dan SMK Bermutu yang merata antar Provinsi, Kabupaten dan Kota	Jumlah pengembangan standar, sistem, program, bahan dan model diklat bagi tenaga kependidikan per tahun	20	100 ^{k)}	
			Jumlah pengembangan standar, sistem, program, bahan dan model diklat bagi PTK-PNF per tahun	20	100 ^{k)}	
			Jumlah lembaga diklat dan penjaminan mutu yang sarana dan prasarana sesuai dengan standar yang telah ditetapkan	12	42	
			Jumlah LPMP dan P4TK yang berstandar nasional dan internasional	8	20	
7.4	Pendidikan dan Pelatihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Meningkatnya Pemberdayaan dan Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase guru inti yang mengikuti peningkatan kompetensi dan profesionalisme bidang pertanian dan perikanan	20%	100%	4.431,8
			Persentase guru inti yang mengikuti peningkatan kompetensi dan profesionalisme bidang rekayasa dan teknologi	20%	100%	
			Persentase guru inti yang mengikuti peningkatan kompetensi dan profesionalisme bidang bisnis dan pariwisata	20%	100%	
			Persentase guru inti yang mengikuti peningkatan kompetensi dan profesionalisme bidang seni dan budaya	20%	100%	
			Persentase guru inti yang mengikuti peningkatan kompetensi dan profesionalisme bidang MIPA	20%	100%	
			Persentase guru inti yang mengikuti peningkatan kompetensi dan profesionalisme bidang IPS dan kewarganegaraan	20%	100%	
			Persentase guru inti yang mengikuti peningkatan kompetensi dan profesionalisme bidang matematika	20%	100%	
			Persentase guru inti yang mengikuti peningkatan kompetensi dan profesionalisme bidang penjasokes dan BK	20%	100%	
			Persentase guru inti yang mengikuti peningkatan kompetensi dan profesionalisme bidang bahasa	20%	100%	

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
			Persentase tenaga kependidikan yang mengikuti peningkatan kompetensi dan profesionalisme sesuai bidangnya	10%	50%	
7.5	Peningkatan Penjaminan Mutu Pendidikan	Meningkatnya Penjaminan Mutu Pendidikan	Persentase guru TK/TKLB yang terpetakan kompetensinya	10%	70%	14.587,6
			Persentase guru SD/SDLB yang terpetakan kompetensinya	10%	70%	
			Persentase guru SMP/SMPLB yang terpetakan kompetensinya	10%	90%	
			Persentase guru SMA/SMALB yang terpetakan kompetensinya	10%	90%	
			Persentase guru SMK yang terpetakan kompetensinya	10%	90%	
			Persentase satuan pendidikan yang terpetakan mutu pendidikannya di tiap provinsi	20%	100%	
7.6	Penyediaan Tenaga Kependidikan Formal untuk Seluruh Jenjang Pendidikan	Tersedianya Tenaga Kependidikan PAUD, SD, SMP, SMA, dan SMK Bermutu yang merata di Kabupaten dan Kota	Persentase pengawas SD yang berkualifikasi S1/D4	28%	100%	435,9
			Persentase pengawas SMP yang berkualifikasi S2	28%	77%	
			Persentase pengawas SMA/SMK yang berkualifikasi S2	28%	77%	
			Persentase kepala SD yang sudah mengikuti <i>training</i> kepala sekolah terakreditasi yang berkualifikasi menurut kab/kota	15%	90%	
			Persentase pengawas SD yang sudah mengikuti <i>training</i> pengawas terakreditasi yang berkualifikasi menurut kab/kota	10%	90%	
			Persentase kepala SMP yang sudah mengikuti <i>training</i> kepala sekolah terakreditasi yang berkualifikasi menurut kab/kota	15%	100%	
			Persentase pengawas SMP yang sudah mengikuti <i>training</i> pengawas terakreditasi yang berkualifikasi menurut kab/kota	35%	90%	

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
			Persentase kepala SMA/SMK yang sudah mengikuti <i>training</i> kepala sekolah terakreditasi yang berkualifikasi menurut kab/kota	15%	100%	
			Persentase pengawas SMA/SMK yang sudah mengikuti <i>training</i> pengawas terakreditasi yang berkualifikasi menurut kab/kota	35%	90%	
7.7	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PMPTK	Menguatnya tata kelola dan sistem pengendalian manajemen di Ditjen PMPTK	Persentase satker yang telah menerapkan sistem penilaian berbasis kinerja	45%	100%	410,4
			Persentase satker menerapkan e-Kuangan	100%	100%	
			Persentase satker menerapkan e-Pengadaan > 50% Paket PBJ	5%	75%	
8	Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan Nasional	Tersedianya Model Pembelajaran, Data, dan Informasi, serta Standar Mutu PAUD, Pendidikan Dasar, Menengah, Tinggi, dan Pendidikan Orang Dewasa dan Akreditasinya serta Pembaruan Pendidikan	Rata-rata lama sekolah (tahun)	7,6	8,25	6.492,2
			Persentase satuan PAUD formal diakreditasi	55,6%	85,0%	
			Persentase satuan PAUD nonformal diakreditasi	0,0%	15,0%	
			Persentase SD/SDLB diakreditasi	70%	100%	
			Persentase program Paket A diakreditasi	0%	40%	
			Persentase SMP/SMPLB diakreditasi	67%	100%	
			Persentase program Paket B diakreditasi	0%	40%	
			Persentase SMA/SMLB/SMK diakreditasi	71%	100%	
			Persentase program Paket C diakreditasi	5%	50%	
			Persentase program Paket C kejuruan diakreditasi	0%	25%	
			Persentase prodi PT diakreditasi	73,7%	95,0%	
			Jumlah prodi diakreditasi internasional	47	312 ^{k)}	
			Persentase program keahlian LKP diakreditasi	6%	30%	
			Persentase PKBM diakreditasi	5%	25%	
			Jumlah model pembelajaran PAUD	2	14 ^{k)}	

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
			Jumlah model kurikulum dikdas	19	99 ^{k)}	
			Jumlah model kurikulum dikmen	11	59 ^{k)}	
			Persentase PAUD yang mengembangkan pembelajaran secara mandiri	31%	60%	
			Persentase satuan dikdas yang mengembangkan kurikulum secara mandiri	39%	67%	
			Persentase satuan pendidikan menengah yang mengembangkan kurikulum secara mandiri	46%	90%	
8.1	Fasilitasi Standar Mutu dan Pelaksanaan Akreditasi	Tersedianya Standar Mutu serta Terlaksananya Akreditasi Pendidikan	Persentase satuan PAUD formal diakreditasi	55,6%	85,0%	4.672,9
			Persentase satuan PAUD nonformal diakreditasi	0%	15%	
			Persentase SD/SDLB diakreditasi	70%	100%	
			Persentase program Paket A diakreditasi	0%	40%	
			Persentase SMP/SMPLB diakreditasi	67%	100%	
			Persentase program Paket B diakreditasi	0%	40%	
			Persentase SMA/SMLB/SMK diakreditasi	71%	100%	
			Persentase program Paket C diakreditasi	5%	50%	
			Persentase program Paket C kejuruan diakreditasi	0%	25%	
			Persentase prodi PT diakreditasi	73,7%	95,0%	
			Jumlah prodi diakreditasi internasional	47	312 ^{k)}	
			Persentase program keahlian LKP diakreditasi	6%	30%	
			Persentase PKBM diakreditasi	5%	25%	
8.2	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Penelitian dan	Menguatnya tata kelola dan sistem pengendalian manajemen Penelitian dan Pengembangan KEMENDIKNAS	Persentase satker yang telah menerapkan sistem penilaian berbasis kinerja	45%	100%	413,0
			Persentase satker menerapkan e-Kuangan	100%	100%	
			Persentase satker menerapkan e-Pengadaan > 50% Paket PBJ	5%	75%	

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
		Menguatnya tata kelola dan sistem pengendalian Balitbang	Jumlah SNP yang dikembangkan	5	5	
			Jumlah pemantauan dan evaluasi SNP	6	8	
			Jumlah penyempurnaan SNP	-	2	
			Jumlah kabupaten/kota yang membentuk jaringan kerjasama penelitian	60	61	
8.3	Penyediaan Sistem Pembelajaran, Penyempurnaan Kurikulum Pendidikan Dasar dan Menengah serta Pembelajaran	Tersedianya Model Kurikulum dan Pembelajaran serta Kurikulum dan Pembelajaran PAUD, DIKDAS, DIKMEN, dan Pendidikan orang dewasa	Jumlah model pembelajaran TK yang dihasilkan	2	14 ^{k)}	328,5
			Jumlah model kurikulum SD/MI yang dihasilkan	1	17 ^{k)}	
			Jumlah model kurikulum SDLB dan SMPLB	2	26 ^{k)}	
			Jumlah model kurikulum Paket A	1	17 ^{k)}	
			Jumlah model kurikulum SMP/MTs yang dihasilkan	1	13 ^{k)}	
			Jumlah model kurikulum Paket B	1	9 ^{k)}	
			Jumlah model kurikulum SMA/MA yang dihasilkan	1	3	
			Jumlah model kurikulum SMK yang dihasilkan	1	5	
			Jumlah model kurikulum SMLB	1	2	
			Jumlah model kurikulum Paket C	1	1	
			Persentase TK yang mengembangkan program pembelajaran aktif yang menghasilkan lulusan yang kreatif, memiliki jiwa kewirausahaan dan karakter bangsa	31%	100%	
			Persentase TKLB yang mengembangkan program pembelajaran aktif yang menghasilkan lulusan yang kreatif, memiliki jiwa kewirausahaan dan karakter bangsa	31%	100%	
			Persentase PAUD non formal yang mengembangkan program pembelajaran aktif yang menghasilkan lulusan yang kreatif, memiliki jiwa kewirausahaan dan karakter bangsa	31%	100%	

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
			Persentase SD/SDLB/Paket A yang mengembangkan kurikulum dengan pembelajaran aktif yang menghasilkan lulusan yang kreatif, memiliki jiwa kewirausahaan dan karakter bangsa	39%	100%	
			Persentase SMP/SMPLB/Paket B yang mengembangkan kurikulum dengan pembelajaran aktif yang menghasilkan lulusan yang kreatif, memiliki jiwa kewirausahaan dan karakter bangsa	42%	100%	
			Persentase SMA/MA yang mengembangkan kurikulum dengan pembelajaran aktif yang menghasilkan lulusan yang kreatif, memiliki jiwa kewirausahaan dan karakter bangsa	42%	100%	
			Persentase SMK yang mengembangkan kurikulum dengan pembelajaran aktif yang menghasilkan lulusan yang kreatif, memiliki jiwa kewirausahaan dan karakter bangsa	46%	100%	
			Persentase Paket C yang mengembangkan kurikulum dengan pembelajaran aktif yang menghasilkan lulusan yang kreatif, memiliki jiwa kewirausahaan dan karakter bangsa	18%	100%	
			Persentase SMLB yang mengembangkan kurikulum dengan pembelajaran secara aktif yang menghasilkan lulusan yang kreatif, memiliki jiwa kewirausahaan dan karakter bangsa mandiri minimal 90%	18%	100%	
			Persentase kabupaten/kota yang menyusun kurikulum orang dewasa berkelanjutan secara mandiri	25%	100%	
			Jumlah model kurikulum untuk pendidikan orang dewasa berkelanjutan	1	5 ^{k)}	
			Jumlah standar kompetensi pendidikan kewirausahaan, budaya dan karakter bangsa pada tingkat nasional, daerah dan sekolah	-	2 ^{k)}	

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
			Persentase penerapan kurikulum sekolah dasar-menengah yang disempurnakan	10%	100%	
8.4	Penyediaan Data Pendidikan untuk Perumusan Kebijakan Nasional	Tersedianya Data PAUD, DIKDAS, DIKMEN dan Pendidikan Orang Dewasa	Persentase TK/TKLB/PAUD non formal yang jumlah datanya teremajakan dalam padati-web dirinci menurut kab/kota	61%	92%	724,4
			Persentase data SD/SDLB/MI yang jumlah datanya teremajakan dalam padati-web dirinci menurut kabupaten/kota	62%	92%	
			Persentase data SMP/SMPLB/MTs yang jumlah datanya teremajakan dalam padati-web dirinci menurut kabupaten/kota	42%	94%	
			Persentase data Paket A/Paket B yang jumlah datanya teremajakan dalam padati-web dirinci menurut kabupaten/kota	25%	95%	
			Persentase SMA/SMK/SMLB/MA/ MAK/Paket C yang jumlah (entitas) datanya teremajakan (<i>up to date</i>) dalam padati-web dirinci menurut kab/kota	41%	90%	
			Persentase penduduk melek huruf usia ≥ 15 tahun yang jumlah datanya teremajakan dalam padati-web dirinci berdasarkan jenis kelamin dan jenis keaksaraan yang dikuasai per kabupaten/kota	20%	80%	
			Persentase data pelaksana program pengarusutamaan gender yang jumlah datanya teremajakan (<i>up to date</i>) dalam padati-web dirinci menurut kabupaten/kota	20%	80%	
			Persentase lembaga kursus dan pelatihan berakreditasi yang jumlah datanya teremajakan dalam padati-web dirinci menurut bidang keterampilan per kabupaten/kota	20%	80%	
			Persentase peserta uji kompetensi pendidikan orang dewasa berkelanjutan yang jumlah datanya teremajakan dalam padati-web dirinci menurut jenis kompetensi per kabupaten/kota	20%	60%	

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
8.5	Penyediaan Informasi untuk Perumusan Kebijakan Nasional	Tersedianya Informasi untuk Perumusan Kebijakan Nasional PAUD, DIKDAS, DIKMEN, DIKTI, dan Pendidikan Orang Dewasa	Jumlah laporan riset kebijakan tentang PAUD	2	10 ^{k)}	115,4
			Jumlah laporan riset kebijakan tentang SD/MI/Paket A	2	10 ^{k)}	
			Jumlah laporan riset kebijakan tentang SMP/MTs/Paket B	2	10 ^{k)}	
			Jumlah laporan riset kebijakan tentang SMA/MA/Paket C	2	11 ^{k)}	
			Jumlah laporan riset kebijakan tentang SMK	3	18 ^{k)}	
			Jumlah laporan riset kebijakan tentang politeknik	-	7 ^{k)}	
			Jumlah laporan riset kebijakan tentang universitas	2	10 ^{k)}	
			Jumlah laporan riset kebijakan tentang kursus dan pendidikan orang dewasa	2	17 ^{k)}	
			Jumlah laporan riset kebijakan tentang lintas jenjang pendidikan	5	25 ^{k)}	
			Jumlah laporan inovasi pendidikan	5	25 ^{k)}	
8.6	Penyediaan Informasi Hasil Penilaian Pendidikan	Tersedianya Informasi Penilaian Kualitas PAUD, DIKDAS, DIKMEN, dan Pendidikan Orang Dewasa	Kesesuaian sistem ujian akhir nasional dengan memperhatikan kemampuan sosial, watak, budi pekerti, kecintaan terhadap budaya-bahasa Indonesia	80%	100%	238,0
			Jumlah soal UASBN + Paket A (Bahasa Indonesia, MIPA, matematika)	5.100	5.100	
			Jumlah soal untuk bank soal UN SMP dan Paket B	8.000	8.000	
			Jumlah bank soal UN SMA/SMLB, SMK dan Paket C	16.300	16.300	
			Jumlah soal non kognitif	2.000	2.000	
			Persentase PAUD formal yang terpetakan kesiapan belajarnya	5%	30%	
			Persentase PAUD nonformal yang terpetakan kesiapan belajarnya	5%	30%	
			Persentase guru SD/SDLB yang terpetakan kompetensinya	10%	30%	
			Persentase bantuan profesional penilaian di kab/kota	25%	100%	

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
			Persentase guru SMP/SMPLB yang terpetakan kompetensinya	20%	60%	
			Persentase guru dikmen yang dipetakan kompetensinya	40%	90%	
			Jumlah laporan survei nasional dan internasional tentang hasil belajar	4	20 ^{k)}	
TOTAL ALOKASI KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL 2010-2014						365.156,6

K : Angka kumulatif 5 tahun (2010-2014)

**RENCANA TINDAK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH TAHUN 2010-2014
PER KEMENTERIAN/LEMBAGA**

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KESEHATAN

NO	PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Milyar)
				2010	2014	
1	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Meningkatnya koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan manajemen Kementerian Kesehatan	1. Jumlah Kab/Kota yang mempunyai kemampuan tanggap darurat dalam penanganan bencana	105	300	13.823,0
			2. Persentase rumah tangga yang melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)	50	70	
1.1	Pemberdayaan Masyarakat dan Promosi Kesehatan	Meningkatnya pelaksanaan pemberdayaan dan promosi kesehatan kepada masyarakat	Persentase rumah tangga yang melaksanakan PHBS	50	70	895,8
1.2	Penanggulangan Krisis Kesehatan	Meningkatnya penanggulangan krisis secara cepat	Jumlah Kab/Kota yang mempunyai kemampuan tanggap darurat dalam penanganan bencana	105	300	651,0
1.3	Pembinaan, Pengembangan Pembiayaan dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan	Terumuskannya kebijakan pembiayaan dan jaminan kesehatan	Persentase penduduk (termasuk seluruh penduduk miskin) yang memiliki jaminan kesehatan	59	100	842,4
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Kesehatan	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana aparatur Kementerian Kesehatan	Persentase pengelolaan sarana prasarana aparatur Kementerian Kesehatan sesuai standar	3	3	284,2
3	Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Kesehatan	Meningkatnya pengawasan dan akuntabilitas aparatur Kementerian Kesehatan	Persentase unit kerja yang menerapkan administrasi yang akuntabel	60	100	443,0
4	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Meningkatnya kualitas penelitian, pengembangan, dan pemanfaatan di bidang kesehatan	Jumlah penelitian yang diproses dalam HAKI	2	10 ^{k)}	2.409,3

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KESEHATAN

NO	PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Milyar)
				2010	2014	
5	Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak	Meningkatnya ketersediaan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan yang bermutu bagi seluruh masyarakat	1. Persentase ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih (cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan (PN))	84	90	11.216,1
			2. Cakupan kunjungan neonatal pertama (KN1)	84	90	
			3. Persentase balita ditimbang berat badannya (jumlah balita ditimbang/seluruh balita (D/S))	65	85	
5.1	Pembinaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Reproduksi	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan ibu dan reproduksi	1. Persentase ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih (cakupan PN)	84	90	2.194,0
			2. Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal (cakupan kunjungan kehamilan ke empat (K4))	84	95	
			3. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan KB sesuai standar	10	100	
5.2	Pembinaan Pelayanan Kesehatan Anak	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan anak	1. Cakupan kunjungan neonatal pertama (KN1)	84	90	1.723,0
			2. Cakupan pelayanan kesehatan bayi	84	90	
			3. Cakupan pelayanan kesehatan balita	78	85	

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KESEHATAN

NO	PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Milyar)
				2010	2014	
5.3	Pembinaan Gizi Masyarakat	Meningkatnya kualitas penanganan masalah gizi masyarakat	1. Persentase balita gizi buruk yang mendapat perawatan	100	100	2.804,2
			2. Persentase balita ditimbang berat badannya (D/S)	65	85	
5.4	Pembinaan Keperawatan dan Kebidanan	Meningkatnya Pembinaan Keperawatan dan Kebidanan	Jumlah Puskesmas yang menerapkan pelayanan kebidanan sesuai standar dan pedoman	70	350	68,0
5.5	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak	Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) beroperasi	70.000	78.000	3.994,6
6	Pembinaan Upaya Kesehatan	Meningkatkan upaya Kesehatan dasar, rujukan, tradisional, alternatif dan komplementer, kesehatan kerja, olah raga dan matra serta standarisasi, akreditasi dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan	1. Jumlah kota di Indonesia yang memiliki RS standar kelas dunia (<i>world class</i>)	1	5	78.647,2
			2. Jumlah puskesmas yang menjadi puskesmas perawatan di perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar berpenduduk	76	96	
6.1	Pembinaan Upaya Kesehatan Dasar	Meningkatnya pelayanan kesehatan dasar kepada masyarakat	1. Jumlah puskesmas yang menjadi puskesmas perawatan di perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar berpenduduk	76	96	1.252,0
			2. Persentase puskesmas rawat inap yang mampu PONED	60	100	

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KESEHATAN

NO	PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Milyar)
				2010	2014	
6.2	Pembinaan Upaya Kesehatan Rujukan	Meningkatnya pelayanan medik spesialistik kepada masyarakat	1. Jumlah kota di Indonesia yang memiliki RS standar kelas dunia (<i>world class</i>)	1	5	434,5
			2. Persentase RS kab/kota yang melaksanakan PONEK	80	100	
			3. Persentase RS Pemerintah menyelenggarakan pelayanan rujukan bagi Orang dengan HIV dan AIDS (ODHA)	60	100	
			4. Jumlah Kab/Kota yang dilayani oleh RS bergerak di daerah tertinggal, terpencil, perbatasan dan kepulauan (DTPK)	14	18	
6.3	Pelayanan Kesehatan Rujukan Bagi Masyarakat Miskin (Jamkesmas)	Meningkatnya pelayanan kesehatan rujukan bagi penduduk miskin di RS	Persentase RS yang melayani pasien penduduk miskin peserta program Jamkesmas	75	95	24.782,7
6.4	Pelayanan Kesehatan Dasar Bagi Masyarakat Miskin (Jamkesmas)	Meningkatnya pelayanan kesehatan dasar bagi penduduk miskin di Puskesmas	Jumlah puskesmas yang memberikan pelayanan kesehatan dasar bagi penduduk miskin	8.481	9.000	6.447,2
6.5	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	Tersedianya Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) untuk puskesmas	Jumlah puskesmas yang mendapatkan bantuan operasional kesehatan dan menyelenggarakan lokakarya mini untuk menunjang pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)	300	9.000	4.940,0

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KESEHATAN

NO	PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Milyar)
				2010	2014	
6.6	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pembinaan Upaya Kesehatan	Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada Program Pembinaan Upaya Kesehatan	Jumlah Unit Pelaksana Teknis (UPT) vertikal yang ditingkatkan sarana dan prasarananya	34	34	40.320,8
7	Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan	Menurunnya angka kesakitan, kematian dan kecacatan akibat penyakit	1. Persentase bayi usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap	80	90	11.263,4
			2. Angka penemuan kasus Malaria per 1.000 penduduk	2	1	
			3. Jumlah kasus TB per 100.000 penduduk	235	224	
			4. Persentase kasus baru TB Paru (BTA positif) yang ditemukan	73	90	
			5. Persentase kasus baru TB Paru (BTA positif) yang disembuhkan	85	88	
			6. Angka kesakitan penderita DBD per 100.000 penduduk	55	51	
			7. Prevalensi kasus HIV	0,2	<0,5	
			8. Jumlah kasus Diare per 1.000 penduduk	350	285	
			9. Jumlah desa yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	2.500	20.000 ^{K)}	
7.1	Pembinaan Imunisasi dan Karantina Kesehatan	Meningkatnya pembinaan di bidang imunisasi dan karantina kesehatan	Persentase bayi usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap	80	90	1.205,9

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KESEHATAN

NO	PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Milyar)
				2010	2014	
7.2	Pengendalian Penyakit Menular Langsung	Menurunnya angka kesakitan dan kematian akibat penyakit menular langsung	1. Prevalensi kasus HIV	0,2	<0,5	1.237,3
			2. Jumlah kasus TB per100.000 penduduk	235	224	
			3. Persentase kasus baru TB Paru (BTA positif) yang ditemukan	73	90	
			4. Persentase kasus baru TB Paru (BTA positif) yang disembuhkan	85	88	
			5. Jumlah kasus Diare per 1.000 penduduk	350	285	
			6. Persentase ODHA yang mendapatkan <i>Anti Retroviral Treatment (ART)</i>	30	50	
			7. Persentase penduduk 15 tahun ke atas menurut pengetahuan tentang HIV dan AIDS	65	95	
7.3	Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang	Meningkatnya pencegahan dan penanggulangan penyakit bersumber binatang	1. Angka kesakitan penderita DBD per100.000 penduduk	55	51	1.254,0
			2. Angka penemuan kasus Malaria per 1.000 penduduk	2	1	
7.4	Penyehatan Lingkungan	Meningkatnya penyehatan dan pengawasan kualitas lingkungan	1. Persentase penduduk yang memiliki akses terhadap air minum berkualitas	62	67	2.054,5
			2. Persentase kualitas air minum yang memenuhi syarat	85	100	
			3. Persentase penduduk yang menggunakan jamban sehat	64	75	

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KESEHATAN

NO	PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Milyar)
				2010	2014	
7.5	Pengendalian Penyakit Tidak Menular	Menurunnya angka kesakitan dan kematian akibat penyakit tidak menular	Persentase provinsi yang memiliki Perda tentang Kawasan Tanpa Rokok	40	100	1.084,4
7.6	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan	Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan	Jumlah UPT vertikal yang ditingkatkan sarana dan prasarananya	59	59	4.427,3
8	Kefarmasian dan Alat Kesehatan	Meningkatnya sediaan farmasi dan alat kesehatan yang memenuhi standar, dan terjangkau oleh masyarakat	Persentase ketersediaan obat dan vaksin	80	100	8.139,4
8.1	Peningkatan Ketersediaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan	Meningkatnya ketersediaan obat esensial generik di sarana pelayanan kesehatan dasar	Persentase ketersediaan obat dan vaksin	80	100	7.473,2
8.2	Peningkatan Produksi dan Distribusi Kefarmasian	Meningkatnya produksi bahan baku dan obat lokal serta mutu sarana produksi dan distribusi kefarmasian	Jumlah bahan baku obat dan obat tradisional produksi di dalam negeri	5	45 ^{k)}	125,0
8.3	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan	Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan	Persentase dokumen anggaran yang diselesaikan	80	100	421,1
9	Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (PPSDMK)	Meningkatnya ketersediaan dan mutu sumber daya manusia kesehatan sesuai dengan standar pelayanan kesehatan	Persentase tenaga kesehatan yang profesional dan memenuhi standar kompetensi	60	80	15.536,2

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KESEHATAN

NO	PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Milyar)
				2010	2014	
9.1	Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan	Meningkatnya perencanaan dan pendayagunaan SDM kesehatan	1. Jumlah tenaga kesehatan yang didayagunakan dan diberi insentif di DTPK	1.200	7.020 ^{k)}	2.884,9
			2. Jumlah residen senior yang didayagunakan dan diberi insentif	700	4.850 ^{k)}	
9.2	Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan	Meningkatnya pelaksanaan pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan	Jumlah tenaga pendidik dan kependidikan yang ditingkatkan kemampuannya	2.350	13.000 ^{k)}	908,1
9.3	Sertifikasi, Standardisasi, dan Peningkatan Mutu SDM Kesehatan	Terselenggaranya sertifikasi, standardisasi, dan peningkatan mutu SDM kesehatan	1. Jumlah SDM kesehatan di fasilitas kesehatan yang telah ditingkatkan kemampuannya melalui pendidikan berkelanjutan	7.530	42.530 ^{k)}	2.316,0
			2. Persentase profesi tenaga kesehatan yang memiliki standar kompetensi	30	90	
9.4	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan	Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada Program Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan	1. Jumlah UPT yang ditingkatkan sarana dan prasarananya	30	60	7.823,2
			2. Jumlah lulusan tenaga kesehatan dari lembaga pendidikan pemerintah	13.000	75.000 ^{k)}	
TOTAL ALOKASI KEMENTERIAN KESEHATAN 2010-2014						141.761,9

K : Angka kumulatif 5 tahun (2010-2014)

**RENCANA TINDAK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH TAHUN 2010-2014
PER KEMENTERIAN/LEMBAGA**

KEMENTERIAN/LEMBAGA: KEMENTERIAN AGAMA

NO	PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	1.Menguatnya tatakelola dan sistem pengendalian manajemen Departemen Agama. 2. Meningkatnya kerukunan umat beragama melalui pembentukan dan efektifitas FKUB	1.Terlaksananya Penyusunan Program dan Anggaran 1. Operasional FKUB 2.Jumlah FKUB	1	5 ^{K)}	12.771,1
1.1	Pembinaan Administrasi Perencanaan	1.Terlaksananya Penyusunan Program dan Anggaran 2. Terlaksananya Penyusunan Bahan Nota Keuangan	DIPA (Dokumen) Bahan Nota Keuangan (Draft)	1	5 ^{K)}	208,8
1.2	Pembinaan Administrasi Kepegawaian	Terlaksananya Diklat Pra Jabatan	Pegawai aparatur, Guru dan Dosen yang mengikuti diklat (orang)	33.834	101.642 ^{K)}	918,8
1.3	Pembinaan Administrasi Keuangan dan BMN	Terlaksananya Penyusunan Laporan Keuangan dan BMN serta Pendampingan Pengelolaan Laporan Keuangan di daerah	Laporan Keuangan dan BMN (Provinsi)	33	33	324,0
1.4	Pembinaan Administrasi Organisasi dan Tatalaksana	Terlaksananya Pembentukan dan Penyempurnaan Organisasi Departemen Agama	Struktur Organisasi Departemen Agama (Provinsi)	33	33	128,8
1.5	Pembinaan Administrasi Hukum dan KLN	1. Terlaksananya Penyuluhan Hukum bagi Aparatur Dep. Agama dan Konsultasi Hukum untuk Penyelesaian Kasus-Kasus Gugatan Hukum di Pengadilan	Penyuluhan Hukum dan Konsultasi Hukum (Kegiatan)	2	10 ^{K)}	138,7

KEMENTERIAN/LEMBAGA: KEMENTERIAN AGAMA

NO	PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
		2. Terlaksananya Kajian Peraturan Perundang-Undangan, Orientasi dan penyusunan Data Base Peraturan Per-UU-an	Peraturan Perundang-Undangan dan Data Base Peraturan Per-UU-an (Kegiatan)	3	15 ^{k)}	
1.6	Pembinaan Administrasi Umum	Tersedianya Biaya pemeliharaan Sarana/Prasarana dan Biaya Langganan Daya dan Jasa Kantor Dep.Agama Pusat	Pemeliharaan Sarana/Prasarana dan Biaya Langganan Daya dan Jasa (Tahun)	1	5 ^{k)}	469,9
1.7	Pembinaan Administrasi PKUB	Terlaksananya Pengelolaan dan Pembinaan Administrasi PKUB	Pelaksanaan Pengelolaan dan Pembinaan Administrasi PKUB (Paket)	1	5 ^{k)}	112,1
1.8	Pembinaan Pendidikan Agama & Keagamaan Konghucu dan Multikultural	Terlaksananya Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama dan Keagamaan	Kualitas Pendidikan Agama dan Keagamaan (Kegiatan)	2	10 ^{k)}	11,1
1.9	Pembinaan Kerukunan Hidup Umat Beragama	1. Tersedianya dana operasional FKUB	Operasional FKUB Tk.Provinsi (FKUB)	33	33	322,4
			Operasional FKUB TK. Kabupaten (FKUB)	150	440	
		2. Terlaksananya Pembangunan Sekber FKUB	Sekber FKUB Tk.Kab/Kota (Unit)	15	30	
		3. Terlaksananya Pemulihan Pasca Konflik	Kegiatan Pemulihan Pasca Konflik (Kegiatan)	1	5 ^{k)}	
1.10	Pembinaan Administrasi Informasi Keagamaan dan Kehumasan	Terlaksananya Pengembangan dan Pemeliharaan Infrastruktur Jaringan Online dan sewa jaringan telekomunikasi satelit	Infrastruktur Jaringan Online dan jaringan telekomunikasi satelit (Kegiatan)	2	2	145,5
1.11	Pembinaan Administrasi KORPRI	Terlaksananya Pengelolaan dan Pembinaan Administrasi Korpri	Pelaksanaan Pengelolaan dan Pembinaan Administrasi Korpri (Paket)	1	5 ^{k)}	14,1
1.12	Pembinaan Administrasi TEKNIS URUSAN HAJI (ATASE)	Terlaksananya Pengelolaan dan Pembinaan Administrasi Atase Haji	Pelaksanaan Pengelolaan dan Pembinaan Administrasi Atase Haji (Paket)	1	5 ^{k)}	36,1
1.13	Pembinaan Administrasi Kanwil	Terlaksananya Pembayaran Gaji, Uang makan, dan Tunjangan serta Biaya pemeliharaan Sarana/Prasarana dan Biaya Langganan Daya dan Jasa Kantor Dep.Agama Daerah	Gaji, Uang makan, dan Tunjangan serta Pemeliharaan Sarana/Prasarana dan Biaya Langganan Daya dan Jasa (Paket)	1	5 ^{k)}	9.941,0

KEMENTERIAN/LEMBAGA: KEMENTERIAN AGAMA

NO	PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
<u>2</u>	<u>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara Kementerian Agama</u>	Terlaksananya Penyediaan Sarana Aparatur	Sarana Aparatur (Paket)	1	5 ^{K)}	475,0
2.1	Penyediaan Sarana dan Prasarana Aparatur Departemen Agama	Terlaksananya Penyediaan Sarana Aparatur	Sarana Aparatur (Paket)	1	5 ^{K)}	475,0
<u>3</u>	<u>Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Agama</u>	Menguatnya sistem pengendalian manajemen dan sistem pengawasan internal Departemen Agama.	Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan (Satker)	76	415 ^{K)}	573,4
3.1	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Sekretariat Itjen	Terlaksananya tata kelola dan manajemen pada Itjen	Perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pada Itjen (kegiatan)	3	15 ^{K)}	192,4
3.2	Pengawasan Fungsional Wilayah I	Terlaksananya Audit Kinerja dan Audit Khusus Keuangan	Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan (Satker)	76	464 ^{K)}	76,3
3.3	Pengawasan Fungsional Wilayah II	Terlaksananya Audit Kinerja dan Audit Khusus Keuangan	Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan (Satker)	81	495 ^{K)}	76,3
3.4	Pengawasan Fungsional Wilayah III	Terlaksananya Audit Kinerja dan Audit Khusus Keuangan	Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan (Satker)	85	519 ^{K)}	76,2
3.5	Pengawasan Fungsional Wilayah IV	Terlaksananya Audit Kinerja dan Audit Khusus Keuangan	Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan (Satker)	72	439 ^{K)}	76,2
3.6	Pengawasan Fungsional Wilayah V	Terlaksananya Audit Kinerja dan Audit Khusus Keuangan	Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan (Satker)	66	404 ^{K)}	76,0
<u>4</u>	<u>Program Bimbingan Masyarakat Islam</u>	Meningkatnya pelayanan agama Islam	Pelayanan Nikah	5.025	5.025	6.860,7
			Penyuluh Agama Islam Non PNS (Orang)	74.821	74.821	
			Pengelolaan Zakat (Provinsi)	33	33	
			Pengelolaan Wakaf (Provinsi)	33	33	
4.1	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Sekretariat Ditjen Bimas Islam	Terlaksananya tata kelola dan manajemen Bimas Islam	Perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian Bimas Islam (kegiatan)	3	15 ^{K)}	168,7
4.2	Pengelolaan Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah	1.Tersedianya dana operasional KUA	Terselenggaranya Pelayanan Nikah (Unit)	5.025	5.025	5.169,4

KEMENTERIAN/LEMBAGA: KEMENTERIAN AGAMA

NO	PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
		2.Terehabilitasinya KUA	Kualitas Gedung KUA (Unit)	500	3.300 ^{K)}	
		3.Terlaksananya bantuan pemberdayaan lembaga sosial keagamaan	Lembaga Sosial Keagamaan (Paket)	3	38 ^{K)}	
4.3	Pengelolaan dan Pembinaan Penerangan Agama Islam	Tersedianya Tunjangan Penyuluh Agama Islam Non PNS/PPN Islam	Penyuluh Agama Islam Non PNS (Orang)	74.821	74.821	1.045,8
4.4	Pengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan Zakat	Terlaksananya pengelolaan zakat dan pembinaan pemberdayaan lembaga-lembaga zakat	Pengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan Zakat (Provinsi)	33	33	279,7
4.5	Pengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan Wakaf	Terlaksananya pengelolaan wakaf dan pembinaan pemberdayaan lembaga-lembaga wakaf	Pengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan Wakaf (Provinsi)	33	33	197,1
5	<u>Program Pendidikan Islam</u>	Tercapainya Akses dan Mutu Pendidikan Islam	APM MI	10,55%	10,64%	150.005,8
			APK MI	13,44%	13,66%	
			APM MTs	14,54%	14,93%	
			APK MTs	19,32%	21,41%	
			APK MA	7,35%	8,56%	
			APK PTA	2,89	3,50	
			Rasio APM peserta didik perempuan:laki laki pada MI	>0,98	1	
			Rasio APM peserta didik perempuan:laki laki pada MTs	>0,97	1	
			Rasio APM peserta didik perempuan:laki laki pada MA	>0,8	1	
			Rasio APM peserta didik perempuan:laki laki pada PTA	1,12	1,04	
5.1	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Sekretariat Ditjen Pendidikan Islam	Terlaksananya tata kelola dan manajemen pendidikan Islam	Perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pendidikan Islam (kegiatan)	3	15 ^{K)}	43.701,0
5.2	Peningkatan Akses dan Mutu Madrasah Ibtidaiyah	Meningkatnya APM MI	APM MI	10,55%	10,64%	12.651,7

KEMENTERIAN/LEMBAGA: KEMENTERIAN AGAMA

NO	PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)	
				2010	2014		
		Meningkatnya APK MI	APK MI	13,44%	13,66%		
			Rasio APM peserta didik perempuan:laki laki pada MI	>0,98	1		
		Terlaksananya Rehab Ruang Kelas MI	Ruang Kelas MI yang direhab (Ruang)	2.165	8.805 ^{K)}		
		Terlaksananya Bantuan Peningkatan Mutu Madrasah MI	Mutu Madrasah MIN (Lokasi)	80	580 ^{K)}		
			Mutu Madrasah MIS (Lokasi)	80	1.080 ^{K)}		
		Terlaksananya Pembangunan Perpustakaan MI	Perpustakaan MI (Ruang)	500	2.000 ^{K)}		
		Terselenggaranya Ujian Nasional MI/MTs Bidang Studi Keagamaan	Penyelenggaraan Ujian Nasional MI/MTs Bidang Studi Keagamaan (Orang)	1.300.000	1.300.000		
5.3	Peningkatan Akses dan Mutu Madrasah Tsanawiyah	Meningkatnya APM MTs	APM MTs	14,54%	14,93%		
		Meningkatnya APK MTs	APK MTs	19,32%	21,41%		
			Rasio APM peserta didik perempuan:laki laki pada MTs	>0,97	1		
			Terlaksananya Rehab Ruang Kelas MTs	Ruang Kelas MTs yang direhab (Ruang)	6.350	18.526 ^{K)}	
			Terlaksananya Bantuan Peningkatan Mutu Madrasah MTs	Mutu Madrasah MTsN (Lokasi)	80	580 ^{K)}	
				Mutu Madrasah MTsS (Lokasi)	80	1.080 ^{K)}	
			Terlaksananya Pembangunan Laboratorium IPA di MTS	Laboratorium IPA di MTS (Ruang)	500	2.000 ^{K)}	
			Tersedianya Peralatan Laboratorium IPA di MTS	Peralatan Laboratorium IPA di MTS (Set)	500	2.000 ^{K)}	
			Terlaksananya Pembangunan RKB MTS	RKB MTS (Ruang)	950	5.702 ^{K)}	
5.4		Peningkatan Akses dan Mutu Madrasah Aliyah	Meningkatnya APK MA	APK MA	7,35%	8,56%	6.341,4
			Rasio APK peserta didik perempuan:laki laki pada MA	>0,8	1		

KEMENTERIAN/LEMBAGA: KEMENTERIAN AGAMA

NO	PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
		Terlaksananya Rehab Ruang Kelas MA	Ruang Kelas MA yang direhab (Ruang)	2.121	10.021 ^{K)}	
		Terlaksananya Pengembangan Mutu MA melalui Kontrak Prestasi	Mutu MA melalui Kontrak Prestasi (Lokasi)	48	288 ^{K)}	
		Terlaksananya Pengembangan Pendidikan Ketrampilan MA	Pendidikan Ketrampilan MA (Lokasi)	58	350 ^{K)}	
		Terlaksananya Bantuan Peningkatan Mutu Madrasah MA	Mutu MAN (Lokasi)	113	565 ^{K)}	
			Mutu MAS (Lokasi)	188	940 ^{K)}	
		Terlaksananya Pengembangan MAN Insan Cendekia	MAN Insan Cendekia (Lokasi)	2	3	
		Terlaksananya Pembangunan Madrasah Bertaraf Internasional	Madrasah Bertaraf Internasional (Lokasi)	16	46 ^{K)}	
		Terselenggaranya Ujian Nasional MA Bidang Studi Keagamaan	Penyelenggaraan Ujian Nasional MA Bidang Studi Keagamaan (Orang)	270.000	270.000	
		Terlaksananya Pembangunan USB MA	USB MA (Unit)	243	503 ^{K)}	
		Terlaksananya Pembangunan RKB MA	RKB MA (Unit)	500	2.500 ^{K)}	
		Terlaksananya Pembangunan Laboratorium dan Perpustakaan MA	Laboratorium dan Perpustakaan MA (Unit)	450	2.250 ^{K)}	
5.5	Peningkatan Mutu dan Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Madrasah	Terlaksananya Sertifikasi Guru	Guru yang tersertifikasi (Orang)	90.000	480.000 ^{K)}	46.747,7
		Terlaksananya Beasiswa guru Program S1	Guru madrasah yang S1 (Guru)	3.500	21.000 ^{K)}	
		Terlaksananya Kualifikasi Guru Program S2	Guru madrasah yang S2 (Guru)	2.000	12.000 ^{K)}	
		Terlaksananya Bantuan Peningkatan Kualifikasi Guru Program S1	Guru madrasah yang S1 (Guru)	10.800	57.000 ^{K)}	
		Terlaksananya Kualifikasi Guru melalui Dual Mode	Kualifikasi Guru madrasah (Guru)	10.000	53.000 ^{K)}	
		Terlaksananya Beasiswa kompetensi ganda guru dalam jabatan	Beasiswa guru kompetensi ganda (Guru)	2.800	14.000 ^{K)}	

KEMENTERIAN/LEMBAGA: KEMENTERIAN AGAMA

NO	PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
		Terlaksananya Sertifikasi Guru dalam jabatan melalui jalur pendidikan	Sertifikasi guru melalui beasiswa (Guru)	2.400	13.500 ^{K)}	
		Terlaksananya subsidi tunjangan fungsional Guru Non - PNS	Tunjangan fungsional Guru Non - PNS (Orang) Sudah S1	184.311	184.311	
			Tunjangan fungsional Guru Non - PNS Belum S1 (Orang)	275.037	275.037	
		Terlaksananya Pembayaran Tunjangan Profesi Guru Non PNS	Tunjangan Profesi Guru non PNS (Orang)	52.144	294.144	
		Terlaksananya Pembayaran Tunjangan Profesi Guru PNS	Tunjangan Profesi Guru PNS (Orang)	87.691	235.691	
		Terlaksananya Pembayaran Tunjangan Khusus Guru	Tunjangan Khusus Guru (Orang)	3.500	3.500	
		Rasio Guru Perempuan-Laki-laki yang bersertifikat pendidik	rasio	50%	85%	
5.6	Penyediaan Subsidi Pendidikan Madrasah Bermutu	Tersedianya anggaran BOS MI dan MTs	Siswa MI, MTs penerima BOS (Siswa)	6.184.150	6.595.965	23.780,8
		MI		3.364.009	3.588.025	
		- Kota	- Kota	494.245	527.158	
		- Kabupaten	- Kabupaten	2.869.764	3.060.867	
		MTs		2.820.141	3.007.940	
		- Kota	- Kota	355.239	378.895	
		- Kabupaten	- Kabupaten	2.464.902	2.629.045	
		Tersedianya Beasiswa Miskin MI	Siswa Miskin MI Penerima Beasiswa (Siswa)	640.000	640.000	
		Tersedianya Beasiswa Miskin MTs	Siswa Miskin MTs Penerima Beasiswa (Siswa)	540.000	540.000	
		Tersedianya Beasiswa Miskin MA	Siswa Miskin MA Penerima Beasiswa (Siswa)	320.000	320.000	

KEMENTERIAN/LEMBAGA: KEMENTERIAN AGAMA

NO	PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
5.7	Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan Keagamaan Islam	Terlaksananya Operasional Penyelenggaraan Paket A dan B	Penyelenggaraan Paket A dan B (Lembaga)	928	1.160	1.244,0
		Terlaksananya Penyelenggaraan Program Wajar Dikdas pada Pontren Syalafiyah	Penyelenggaraan PPS Program Wajar Dikdas pada Pontren (Lembaga)	8.027	8.027	
		Terselenggaranya Life Skills dan Short Course Pendidikan Non Formal	Life Skills dan Short Course Pendidikan Non Formal (Lembaga)	100	125	
		Terselenggaranya Pembelajaran Paket C Pontren dan Lembaga Pendidikan Keagamaan	Paket C pada Pontren dan Lembaga Pendidikan Keagamaan (Lokasi)	300	350	
		Terlaksananya Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama dan Keagamaan	Kualitas Pendidikan Agama dan Keagamaan (Lokasi)	34	34	
5.8	Penyediaan Subsidi Pendidikan Agama Islam Bermutu			610.366	651.011	1.628,8
		a. BOS Siswa Diniyah Ula	a. BOS Siswa Diniyah Ula	191.794	204.566	
		- Kota	- Kota	11.599	12.371	
		- Kabupaten	- Kabupaten	180.195	192.195	
		b. BOS Siswa Diniyah Wustha	b. BOS Siswa Diniyah Wustha	418.572	446.445	
		- Kota	- Kota	24.617	26.256	
		- Kabupaten	- Kabupaten	393.955	420.189	
5.9	Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan Tinggi Islam	Meningkatnya APK PTA	APK PTA	2,89	3,50	10.009,1
			Rasio APK peserta didik perempuan:laki laki pada PTA	1,12	1,04	
		Terlaksananya Peningkatan Sarana Prasarana Perti Termasuk Pasca Bencana	Sarana Prasarana Pendidikan Tinggi (Lembaga)	53	68	
		Terlaksananya Pengembangan Perpustakaan dan ICT	Perpustakaan dan ICT (Unit)		62	
		Terlaksananya Penelitian pada PTAN	Lembaga Peneliti (Lembaga)	53	53	

KEMENTERIAN/LEMBAGA: KEMENTERIAN AGAMA

NO	PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
		Terlaksananya Pembangunan Gedung PTAN	Gedung Pendidikan Tinggi Agama (Lembaga)	4	4	
		Terlaksananya Pengabdian Masyarakat Berbasis Program	Pengabdian Masyarakat Berbasis Program (Lembaga)	53	53	
5.10	Penyediaan Subsidi Pendidikan Tinggi Islam	Tersedianya Beasiswa Mahasiswa Miskin	Mahasiswa Miskin Penerima Beasiswa (Orang)	59.538	59.538	788,5
		Terlaksananya Beasiswa S1 santri berprestasi	Beasiswa S1 santri berprestasi (Orang)	2.035	2.535	
5.11	Peningkatan Mutu dan Kesejahteraan Dosen dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Tinggi Islam	Tersedianya Tunjangan Profesi Dosen Non PNS	Profesi Dosen Non PNS (Orang)	400	600	2.021,4
		Tersedianya Tunjangan Profesi Dosen PNS	Profesi Dosen PNS (Orang)	3.864	13.864	
		Tersedianya Tunjangan Profesi Dosen Non PNS Guru Besar	Profesi Dosen Non PNS Guru Besar (Orang)	430	430	
		Terlaksananya Beasiswa Dosen Program S2	Dosen PTAI yang S2 (Orang)	600	2.900 ^{K)}	
		Terlaksananya Beasiswa Dosen Program S3	Dosen PTAI yang S3 on Going (Orang)	200	450	
			Dosen PTAI yang S3 Baru (Orang)	250	1.000 ^{K)}	
		Terlaksananya Kualifikasi Dosen Program S2/S3	Dosen Program S2/S3 (Dosen)	1.250	6.250 ^{K)}	
		Terlaksananya Percepatan Sertifikasi Dosen	Dosen yang tersertifikasi (Dosen)	4.000	17.000 ^{K)}	
		Terlaksananya Peningkatan Kompetensi Dosen (short course)	Dosen yang mengikuti Short Course (Orang)	100	400 ^{K)}	
5.12	Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan Agama Islam pada Sekolah	Terlaksananya Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama dan Keagamaan	Kualitas Pendidikan Agama dan Keagamaan (Lokasi)	34	34	1.015,5
5.13	Peningkatan Mutu dan Kesejahteraan Pendidik dan Pengawas Pendidikan Agama Islam	Terlaksananya Peningkatan Mutu dan Kesejahteraan Pendidik dan Pengawas Pendidikan Agama Islam	Kualitas dan kesejahteraan Pendidik dan Pengawas (Provinsi)	33	33	75,9
6	<u>Program Bimbingan Masyarakat Kristen</u>	Terselenggaranya urusan dan pendidikan agama Kristen	Kinerja Penyuluh Agama Kristen Non PNS (Orang)	6.697	6.697	1.646,1
			Kualitas Pendidikan Agama dan Keagamaan (Lokasi)	34	34	

KEMENTERIAN/LEMBAGA: KEMENTERIAN AGAMA

NO	PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
6.1	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Sekretariat Ditjen Bimas Kristen	Terlaksananya tata kelola dan manajemen pendidikan Kristen	Perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pendidikan Kristen (kegiatan)	3	15 ^{K)}	93,1
6.2	Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Kristen	1.Tersedianya Tunjangan Penyuluh Agama Kristen Non PNS/PPP 2.Terlaksananya bantuan pemberdayaan lembaga sosial keagamaan	Kinerja Penyuluh Agama Kristen Non PNS (Orang) Lembaga Sosial Keagamaan (Paket)	6.697 1	6.697 15 ^{K)}	248,7
6.3	Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Kristen	1.Terlaksananya Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama dan Keagamaan 2.Terlaksananya Peningkatan Sarana Prasarana Perti Termasuk Pasca Bencana 3.Terlaksananya Pengembangan Perpustakaan dan ICT 4.Terlaksananya Penelitian pada PTAN 5.Terlaksananya Pengabdian Masyarakat Berbasis Program	Kualitas Pendidikan Agama dan Keagamaan (Lokasi) Sarana Prasarana Pendidikan Tinggi (Lembaga) Perpustakaan dan ICT (Lembaga) Lembaga Peneliti (Lembaga) Pengabdian Masyarakat Berbasis Program (Lembaga)	34 7 4 6 6	34 7 6 6 6	1.304,3
7	Program Bimbingan Masyarakat Katolik	Terselenggaranya urusan dan pendidikan agama Katolik	Penyuluh Agama Katolik Non PNS (Orang)	4.406	4.405 ^{K)}	790,0
			Kualitas Pendidikan Agama dan Keagamaan (Lokasi)	34	34	
7.1	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Sekretariat Ditjen Bimas Katolik	Terlaksananya tata kelola dan manajemen pendidikan Katolik	Perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pendidikan Katolik (kegiatan)	3	15 ^{K)}	71,8
7.2	Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Katolik	1. Tersedianya Tunjangan Penyuluh Agama Katolik Non PNS/PPP 2. Terlaksananya bantuan pemberdayaan lembaga sosial keagamaan	Penyuluh Agama Katolik Non PNS (Orang) Lembaga Sosial Keagamaan (Paket)	4.406 1	4.406 10 ^{K)}	182,9

KEMENTERIAN/LEMBAGA: KEMENTERIAN AGAMA

NO	PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
7.3	Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Katolik	1. Terlaksananya Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama dan Keagamaan	Kualitas Pendidikan Agama dan Keagamaan (Lokasi)	34	34	535,3
		2. Terlaksananya Peningkatan Sarana Prasarana Perti Termasuk Pasca Bencana	Sarana Prasarana Pendidikan Tinggi (Lembaga)	1	1	
8	Program Bimbingan Masyarakat Hindu	Terselenggaranya urusan dan pendidikan agama Hindu	Penyuluh Agama Hindu Non PNS (Orang)	3.088	3.088	1.003,8
			Kualitas Pendidikan Agama dan Keagamaan (Lokasi)	34	34	
8.1	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Sekretariat Ditjen Bimas Hindu	Terlaksananya tata kelola dan manajemen Bimas Hindu	Perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian Bimas Hindu (kegiatan)	3	15 ^{K)}	40,7
8.2	Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Hindu	1. Tersedianya Tunjangan Penyuluh Agama Hindu Non PNS/PPP	Penyuluh Agama Hindu Non PNS (Orang)	3.088	3.088	144,7
		2. Terlaksananya bantuan pemberdayaan lembaga sosial keagamaan	Lembaga Sosial Keagamaan (Paket)	1	10 ^{K)}	
8.3	Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Hindu	1. Terlaksananya Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama dan Keagamaan	Kualitas Pendidikan Agama dan Keagamaan (Lokasi)	34	34	818,4
		2. Terlaksananya Peningkatan Sarana Prasarana Perti Termasuk Pasca Bencana	Sarana Prasarana Pendidikan Tinggi (lembaga)	3	3	
		3. Terlaksananya Pengembangan Perpustakaan dan ICT	Perpustakaan dan ICT (lembaga)	2	3	
		4. Terlaksananya Penelitian pada PTAN	Lembaga Peneliti (lembaga)	3	3	
		5. Terlaksananya Pengabdian Masyarakat Berbasis Program	Pengabdian Masyarakat Berbasis Program (lembaga)	3	3	
9	Program Penyelenggaraan, Pembinaan dan Pengelolaan Haji dan Umrah	Terlaksananya Penyelenggaraan Haji dan Umrah yang tertib dan lancar	Pelaksanaan Ibadah Haji serta Pengawasan Haji yang Tertib dan Lancar (Jamaah)	210.000	1.050.000 ^{K)}	1.117,5

KEMENTERIAN/LEMBAGA: KEMENTERIAN AGAMA

NO	PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
9.1	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Setditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah	Terlaksananya tata kelola dan manajemen Penyelenggaraan Haji dan Umrah	Perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian Penyelenggaraan Haji dan Umrah (kegiatan)	3	15 ^{K)}	98,1
9.2	Pembinaan Haji dan Umrah	Terlaksananya Pembinaan Ibadah Haji dan Umrah	Pelaksanaan Pembinaan Ibadah Haji dan Umrah (Provinsi)	33	33	170,5
9.3	Pelayanan Haji dan Umrah	Terlaksananya Pelayanan Ibadah Haji dan Umrah serta Pengawasan Haji	Pelaksanaan Ibadah Haji serta Pengawasan Haji yang Tertib dan Lancar (Jamaah)	210.000	1.050.000 ^{K)}	775,4
9.4	Pengelolaan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah	Terlaksananya Pengelolaan biaya penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah	Pelaksanaan Pengelolaan biaya penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (kegiatan)	34	34	73,5
<u>10</u>	<u>Program Bimbingan Masyarakat Budha</u>	<u>Terselenggaranya urusan dan pendidikan agama Budha</u>	<u>Penyuluh Agama Buddha Non PNS (orang)</u>	<u>1.498</u>	<u>1.498</u>	<u>561,2</u>
			Kualitas Pendidikan Agama dan Keagamaan (lokasi)	34	34	
10.1	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Sekretariat Ditjen Bimas Buddha	Terlaksananya tata kelola dan manajemen pendidikan Agama Budha	Perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pendidikan Agama Budha (kegiatan)	3	15 ^{K)}	99,7
10.2	Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan dan Urusan Agama Budha	1. Terlaksananya Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama dan Keagamaan	Kualitas Pendidikan Agama dan Keagamaan (lokasi)	34	34	461,5
		2. Tersedianya Tunjangan Penyuluh Agama Buddha Non PNS/PPN	Penyuluh Agama Buddha Non PNS (orang)	1.498	1.498	
		3. Terlaksananya bantuan pemberdayaan lembaga sosial keagamaan	Lembaga Sosial Keagamaan (Paket)	1	9 ^{K)}	
		4. Tersedianya Beasiswa Mahasiswa Miskin	Mahasiswa Miskin Penerima Beasiswa (orang)	503	503	
		5. Terlaksananya Peningkatan Sarana Prasarana Perti Termasuk Pasca Bencana	Sarana Prasarana Pendidikan Tinggi (lembaga)	2	2	

KEMENTERIAN/LEMBAGA: KEMENTERIAN AGAMA

NO	PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
		6. Terlaksananya Pengembangan Perpustakaan dan ICT	Perpustakaan dan ICT (lembaga)	1	1	
		7. Terlaksananya Penelitian pada PTAN	Lembaga Peneliti (lembaga)	1	1	
		8. Terlaksananya Pengabdian Masyarakat Berbasis Program	Pengabdian Masyarakat Berbasis Program (lembaga)	1	1	
11	Program Penelitian dan Pengembangan Serta Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Agama	Terlaksananya penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan serta Pendidikan dan Pelatihan Departemen Agama	Penelitian dan Pengembangan Agama (kegiatan)	9	53 ^{K)}	2.743,0
			Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Agama dan Keagamaan (kegiatan)	10	55 ^{K)}	
			Diklat Struktural dan Diklat Fungsional (kegiatan)	22	118 ^{K)}	
11.1	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Sekretariat Badan Litbang dan Diklat	Terlaksananya tata kelola dan manajemen Litbang dan Diklat	Perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian Litbang dan Diklat (kegiatan)	3	15 ^{K)}	678,6
11.2	Penelitian dan Pengembangan Kehidupan Keagamaan	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Lektur kehidupan Keagamaan	Lektur Kehidupan Keagamaan (kegiatan)	3	23 ^{K)}	194,9
11.3	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Agama dan Keagamaan	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama dan Keagamaan	Lektur Pendidikan Agama dan Keagamaan (kegiatan)	10	59 ^{K)}	115,0
11.4	Penelitian dan Pengembangan Lektur Keagamaan	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Lektur Keagamaan	Lektur Keagamaan (kegiatan)	6	38 ^{K)}	169,2
11.5	Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Administrasi	Terlaksananya Diklat Struktural dan Diklat Fungsional	Diklat Struktural dan Diklat Fungsional (kegiatan)	10	57 ^{K)}	808,7
11.6	Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis Keagamaan	Terlaksananya Diklat Struktural dan Diklat Fungsional	Diklat Struktural dan Diklat Fungsional (kegiatan)	12	71 ^{K)}	692,1
11.7	Lajnah Pentashihan Mushaf Alquran	Terlaksananya Pentashihan Mushaf Al-Quran	Pentashihan AlQuran (kegiatan)	2	30 ^{K)}	84,6
TOTAL ALOKASI KEMENTERIAN AGAMA 2010-2014						178.547,4

K : Angka kumulatif 5 tahun (2010-2014)

**RENCANA TINDAK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH 2010-2014
PER KEMENTERIAN/LEMBAGA**

KEMENTERIAN/LEMBAGA: KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

No	PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
I	PROGRAM PENINGKATAN KOMPETENSI TENAGA KERJA DAN PRODUKTIVITAS					4.059,9
1.	Pengembangan Standar Kompetensi Kerja dan Program Pelatihan	Tersusunnya standar kompetensi kerja nasional yang sesuai dengan kebutuhan pengguna sektor industri manufaktur dan sektor non-industri manufaktur.	Peta kompetensi industri sesuai kebutuhan pengguna;		Survey dan pemetaan sektor manufaktur dan non manufaktur ^{K)}	458,7
			Jumlah Asosiasi profesi yang terlibat penyusunan SKKNI	-	40% asosiasi profesi	
			Jumlah penetapan SKKNI sesuai peta kompetensi industri	-	50% SKKNI	
			Jumlah Penetapan SKKNI sesuai peta kompetensi non manufaktur termasuk jasa logistik		30% SKKNI	
			Jumlah ketetapan SKKNI yang diterapkan oleh diklat profesi;	-	40% SKKNI	
			Tersusunnya harmonisasi peraturan tentang sertifikasi kompetensi tenaga kerja.	peraturan kerangka kualifikasi nasional	peraturan kerangka kualifikasi nasional ^{K)}	
			Jumlah penetapan standar kompetensi dalam kerangka MRA		6 ^{K)}	
			Jumlah program pelatihan berbasis kompetensi	50	500 ^{K)}	

KEMENTERIAN/LEMBAGA: KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

No	PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
		Terlaksananya pelatihan berbasis kompetensi	Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi	25.000	370.000 ^{K)}	
2.	Pelatihan Kewirausahaan	Terlaksananya pelatihan calon wirausaha baru	Jumlah calon wirausaha baru yang dilatih		40.000 ^{K)}	417,5
3.	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan, Sarana dan Pembedayaan Kelembagaan Pelatihan dan Produktivitas	Diterapkannya tata kelola manajemen yang baik oleh lembaga pelatihan berbasis kompetensi	Tersusunnya standar baku yang memenuhi kriteria sebagai lembaga pelatihan berbasis kompetensi	Rancangan standar baku	Penetapan standar baku dan sosialisasi di 33 provinsi ^{K)}	696,7
			Tersusunnya panduan tata pengelolaan dan pengembangan manajemen lembaga pelatihan	Pedoman manajemen lembaga pelatihan yang berlaku secara nasional	Pedoman manajemen lembaga pelatihan dan sosialisasi di 33 provinsi ^{K)}	
			Jumlah lembaga pelatihan kerja yang menerapkan pedoman tata pengelolaan dan pengembangan manajemen lembaga pelatihan		65 ^{K)}	
			Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan komitmen kesepakatan dan kesepahaman untuk pengembangan lembaga pelatihan berbasis kompetensi	40	65 ^{K)}	
			Jumlah BLK yang menyelenggarakan pelatihan berbasis kompetensi;	11	43 ^{K)}	
			Jumlah BLK yang menerapkan ISO	3	20 ^{K)}	
			Jumlah BLK yang diakreditasi sebagai TUK	8	11 ^{K)}	
			Jumlah BLK yang diakreditasi sebagai BLU	4	11 ^{K)}	
			Jumlah lembaga pelatihan yang terakreditasi	40	120 ^{K)}	
Jumlah BLK yang ditingkatkan kualitasnya	40	65 ^{K)}				

KEMENTERIAN/LEMBAGA: KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

No	PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
4	Peningkatan Penyelenggaraan Pemagangan Dalam dan Luar Negeri	Terselenggaranya pelatihan melalui pemagangan bersertifikat kompetensi yang berbasis pengguna di dalam dan luar negeri	Jumlah peserta yang mengikuti pemagangan di perusahaan	10.000	50.000 ^{KS)}	247,6
			Jumlah peserta pemagangan yang mendapat sertifikat kompetensi	2.500	22.500 ^{KS)}	
5	Peningkatan Kompetensi Instruktur dan Tenaga Keahlian	Meningkatnya kompetensi instruktur dan tenaga kepeleatihan	Jumlah instruktur pelatihan berbasis kompetensi yang memiliki sertifikat	% instruktur berbasis kompetensi naik 30%	% instruktur berbasis kompetensi naik 60%	209,5
			Jumlah manajer BLK berbasis kompetensi yang dilatih	20% manajer BLK	100% manajer BLK ^{KS)}	
6	Pengembangan dan Peningkatan Produktivitas	Meningkatnya produktivitas tenaga kerja dan perusahaan	Jumlah Tenaga kerja yang ditingkatkan produktivitasnya		47.500 ^{KS)}	163,4
			Jumlah Kabupaten/kota yang melaksanakan pengukuran produktivitas		110 kab/kota	
II	PROGRAM PENEMPATAN DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA					3.267,6
1	Peningkatan Perlindungan Pekerja Migran Melalui Perbaikan Regulasi	Tersedianya regulasi yang melindungi pekerja migran.	Ratifikasi konvensi buruh migran dan keluarganya	Penyiapan ratifikasi konvensi buruh migran	Ratifikasi konvensi buruh migran	488,1
			Amandemen UU 39/2004;	Persiapan amandemen UU	Amandemen UU ^{KS)}	
			Persentase peraturan turunan amandemen UU		100% peraturan turunan tersusun ^{KS)}	
			Jumlah perjanjian penempatan MoU dengan negara tujuan	10 MOU	17 MOU ^{KS)}	
			%Calon pekerja migran yang terlayani dan tercatat pada dinas tenaga kerja provinsi dan kabupaten	100% calon pekerja migran terlayani	100% calon pekerja migran terlayani	
			Tersedianya sistem komputerisasi Tenaga Kerja Luar Negeri (Sisko TKLN)	14 embarkasi	14 embarkasi	
			Jumlah atase ketenagakerjaan yang memberi perlindungan pekerja migran	13 Atase	13 Atase	

KEMENTERIAN/LEMBAGA: KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

No	PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
2	Pengembangan dan Peningkatan Perluasan Kesempatan Kerja	Tersedianya peluang kerja produktif di berbagai bidang usaha produktif	(a) Jumlah penganggur yang memperoleh pekerjaan sementara; (b) Jumlah kabupaten/kota yang menyelenggarakan program pengurangan pengangguran sementara	24.000 orang, 231 Kab/Kota	384.000 Orang; 360 ^{KS)} Kab/kota	856,7
			Jumlah wirausaha baru yang tercipta	5.396 Orang, 270 Paket	45.000 Orang ^{KS)}	763,8
			Jumlah pendamping wirausaha baru		7000 Orang Pendamping wirausaha ^{KS)}	
			Jumlah Tenaga Kerja Sukarela yang melakukan pendampingan dalam Program perluasan Kesempatan Kerja	1.000 Orang TKS	6.400 Orang TKS ^{KS)}	
			Jumlah Kabupaten/Kota yang melaksanakan sinergi program APBN untuk perluasan kesempatan kerja	231 Kab / Kota	200 Kab/ Kota	
3	Peningkatan Pengembangan Pasar Kerja	Terbangunnya layanan sistem informasi pasar kerja.	Adanya sistem informasi pasar kerja on-line	a. Electronic form	Sistem Informasi Pasar kerja online Operasional dan pemeliharaan ^{KS)}	269,8
				b. Document management		
				c. Job order management		
				d. Recruitment management		

KEMENTERIAN/LEMBAGA: KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

No	PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
				e. Selection management		
				f. Security		
				g. Interoperability		
				h. Placement management		
				i. Campaign management		
				j. Operasional		
		Terwujudnya pusat-pusat pelayanan informasi pasar kerja berkualitas yang dibutuhkan oleh pencari kerja dan pengguna tenaga kerja.	Jumlah pusat layanan informasi pasar kerja tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang terhubung dengan sistem dengan sistem <i>bursa kerja on-line</i> dan menerapkan standar layanan sesuai "model bisnis layanan" yang baik	6 Provinsi menerapkan model bisnis layanan IPK	33 Provinsi menerapkan model bisnis layanan IPK	
				20 Kab/Kota menerapkan model bisnis layanan IPK	60 Kab/Kota menerapkan model bisnis layanan IPK	
			Tersedianya infrastruktur SIM pasar kerja (33 provinsi, 200 kab/kota)	server, network, koneksi internet	server, network, koneksi internet	
			Tersedianya infrastruktur SIM pasar kerja (33 provinsi, 200 kab/kota)	Server, network, koneksi internet	Koneksi internet	
			Jumlah pencari kerja yang memanfaatkan jasa pusat layanan informasi pasar kerja	100.000	1.500.000 ^{KJ}	
			Jumlah bursa kerja yang memenuhi standar pelayanan umum	33 provinsi, 146 Kab/kota	33 provinsi, 456 Kab/Kota	

KEMENTERIAN/LEMBAGA: KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

No	PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
III	PROGRAM PENINGKATAN PEMBINAAN DAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA					1.346,5
1	Penyempurnaan Peraturan Ketenagakerjaan	Tersusunnya Peraturan yang dapat mendorong penciptaan kesempatan kerja dan memperkuat lembaga HI	Tersusunnya peraturan bidang HI yang meliputi pengaturan ttg kompensasi & penetapan PHK, Hubungan kerja (PKWT&Outsourcing), pengupahan (UM, KHLm, upah selama skorsing), perlindungan pekerja, mogok kerja	Naskah akademik	Amandemen, UU, ^{K)} Peraturan pelaksanaan, Sosialisasi, konsolidasi	182,0
			Tersusunnya peraturan tentang organisasi pekerja/buruh		Amandemen, UU, ^{K)} Peraturan pelaksanaan, Sosialisasi, konsolidasi	
			Tersusunnya peraturan tentang penyelesaian perselisihan HI		Amandemen, UU, ^{K)} Peraturan pelaksanaan, Sosialisasi, konsolidasi	
		Terbangunnya kebijakan ketenagakerjaan pusat dengan kebijakan/peraturan daerah secara sinergis	Harmonisasi kebijakan jaminan sosial		4 rancangan naskah ^{K)}	5,0
		Selarasnya peraturan bidang HI	Inventarisasi perda HI	Inventarisasi Perda HI & assessment, Sosialisasi dan konsolidasi dengan Pemda		145,0

KEMENTERIAN/LEMBAGA: KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

No	PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
1	Pengelolaan Kelembagaan dan Pemasarakatan Hubungan Industrial	Tercapainya kesepakatan dalam hubungan kerja.	Tersusunnya mekanisme perundingan secara bipartit, pencatatan, keterwakilan dan verifikasi SP/SB	2 naskah	4 naskah ^{KJ}	368,5
			Jumlah lembaga kerjasama (LKS) bipartit di perusahaan	naik 5%	% LKS Bipartit di perusahaan naik 20% dari 2010 ^{KJ}	
			Jumlah perwakilan pekerja, SP/SB dan pengusaha yang mendapat pendidikan teknik bernegosiasi	500	5.000 ^{KJ}	
			Jumlah pembentukan LKS tripartit kabupaten/kota	49 LKS	242 LKS ^{KJ}	
			Jumlah anggota LKS bipartit dan tripartit yang diberdayakan	160 LKS	1800 LKS ^{KJ}	
			Jumlah SDM yang memahami HI	3000	30.000 ^{KJ}	
			Tersusunnya SKKNI ahli HI	Inventarisasi kompetensi	Inventarisasi kompetensi, pemetaan dan penerapan SKKNI AHI	
IV	PROGRAM PERLINDUNGAN TENAGA KERJA DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN					1.000,8
1	Peningkatan Perlindungan Pekerja Perempuan dan Penghapusan Pekerja Anak	Memfasilitasi pekerja anak untuk kembali ke dunia pendidikan atau memperoleh pelatihan keterampilan	Jumlah pekerja anak yang ditarik dari BPTA	3.000	28.200 ^{KJ}	212,0
		Berkurangnya jumlah anak yang bekerja pada bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak	Persentase pekerja anak yang ditarik dari BPTA yang dikembalikan ke dunia pendidikan dan/atau memperoleh pelatihan keterampilan	100%	100%	
		Meningkatnya perlindungan kepada pekerja perempuan	Persentase perusahaan yang memenuhi norma kerja perempuan dan anak	10%	40%	58,8

KEMENTERIAN/LEMBAGA: KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

No	PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
			Tersedianya kebijakan dalam upaya perlindungan pekerja perempuan dan anak	Draft RPP Penanggulangan Anak yang Bekerja di Luar Hubungan Kerja	PP Penanggulangan Anak yang Bekerja di Luar Hubungan Kerja dan aturan pelaksanaan ^{KJ}	
				Pedoman Pengawasan Norma Kerja Perempuan	Pedoman Pengawasan Norma Kerja Perempuan dan Sosialisasi ^{KJ}	
			Jumlah pengawas ketenagakerjaan dalam pengawasan norma kerja perempuan dan anak yang ditingkatkan kapasitasnya	120	990 ^{KJ}	
2	Peningkatan Penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	Diterapkannya manajemen dan standar K3.	Jumlah perusahaan yang menerapkan manajemen K3	% perusahaan naik 10%	% perusahaan naik 50% dari 2010	460,0
		Menurunnya jumlah kecelakaan dan penyakit akibat kerja	Jumlah tenaga pengawas yang memenuhi standar kompetensi.	20% tenaga pengawas K3 bersertifikat kompetensi	65 % tenaga pengawas K3 bersertifikat kompetensi	
			Persentase tenaga pengawas yang ditingkatkan kapasitasnya		100% tenaga pengawas ditingkatkan kapasitasnya	

KEMENTERIAN/LEMBAGA: KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

No	PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
V	PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA DEPNEKERTRANS					1.423,3
VI	PROGRAM PENGAWASAN DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS APARATUR DEPNAKERTRANS					228,7
VII	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DEPNAKERTRANS					286,7
VIII	PROGRAM PENGEMBANGAN MASYARAKAT DAN KAWASAN TRANSMIGRASI					3.399,6
a.	Dukungan Teknis dan Manajemen Ditjen P2MKT	<ul style="list-style-type: none"> ■ Tersedianya dukungan manajemen dan teknis terhadap pelaksanaan pengembangan masyarakat transmigrasi dan kawasan transmigrasi (Pembangunan Perdesaan di Wilayah Strategis) 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Tersusunnya Program dan Anggaran Satuan Kerja (Pusat, Provinsi dan Kabupaten) ■ Terwujudnya pelaksana Anggaran dan Pelaporan berbasis Kinerja secara optimal sesuai dengan ketentuan APBN ■ Tersedianya sarana dan prasara-na kerja pada 6 Satuan Kerja sesuai kebutuhan organisasi ■ Meningkatnya kompetensi pegawai sebanyak 490 orang yang sesuai dengan kebutuhan organisasi ■ Tersedianya bahan rumusan Norma, Standar, Kriteria dan Prosedur (NSPK) 	170 Pkt	873 Pkt ^{KJ}	259,7
			12 Pkt	60 Pkt ^{KJ}		
			12 Pkt	60 Pkt ^{KJ}		
			450 org	2.410 org ^{KJ}		
			12 Pkt	60 Pkt ^{KJ}		

KEMENTERIAN/LEMBAGA: KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

No	PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
b.	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Masyarakat di Kawasan Transmigrasi	<ul style="list-style-type: none"> ■ Meningkatnya penguatan kelembagaan perdesaan di permukiman transmigrasi (Pembangunan Perdesaan di Daerah Tertinggal) 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Jumlah kelembagaan masyarakat yang mandiri 	10	127 Lembaga ^{KJ}	1.107,0
		<ul style="list-style-type: none"> ■ Meningkatnya kapasitas aparat dalam pengelolaan dan pelayanan bagi masyarakat di kawasan transmigrasi (Pembangunan Perdesaan di Daerah Tertinggal) 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Jumlah aparat yang memiliki kapasitas pengelolaan dan pelayanan di Kawasan Transmigrasi 	144 kimtrans	743 kimtrans ^{KJ}	
		<ul style="list-style-type: none"> ■ Meningkatnya kapasitas sumber daya manusia dalam proses pengembangan di kawasan transmigrasi (Pembangunan Perdesaan di Daerah Tertinggal) 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Jumlah fasilitasi kegiatan yang dilakukan; 	12 bln	60 bln ^{KJ}	
			<ul style="list-style-type: none"> ■ Jumlah pelatihan dan pendampingan yang diberikan 	12 kali	60 kali ^{KJ}	
		<ul style="list-style-type: none"> ■ Meningkatnya peran serta lintas sector, swasta dan masyarakat di kawasan transmigrasi (Pembangunan Perdesaan di Daerah Tertinggal) 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Jumlah lintas sector yang berperan 	5 LS	36 LS ^{KJ}	
			<ul style="list-style-type: none"> ■ Jumlah swasta / investor yang berperan 	9	59 ^{KJ}	
			<ul style="list-style-type: none"> ■ Jumlah masyarakat transmigrasi yang berperan 	34.861 Kel	197.550 Kel ^{KJ}	
		<ul style="list-style-type: none"> ■ Terciptanya peningkatan kualitas dasar masyarakat di Kawasan Transmigrasi (Pembangunan Perdesaan di Daerah Tertinggal) 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Bantuan Pangan 	13.876 Kel	87.433 Kel ^{KJ}	
			<ul style="list-style-type: none"> ■ Bantuan Pendidikan 	27.925 Kel	165.904 Kel ^{KJ}	
			<ul style="list-style-type: none"> ■ Bantuan Kesehatan 	36.861 Kel	200.052 Kel ^{KJ}	
<ul style="list-style-type: none"> ■ Pelayanan Mental spiritual 	131 Kel		735 Kel ^{KJ}			
<ul style="list-style-type: none"> ■ Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengembangan masyarakat dan kawasan transmigrasi (Pengembangan Ekonomi Lokal dan Daerah di Daerah Tertinggal) 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Jumlah pelatihan /Bintek/ Diseminasi/ studi Banding mengenai pengembangan ekonomi lokal dan daerah untuk aparaturnya pengelola kawasan transmigrasi 	3 kali	12 kali ^{KJ}			

KEMENTERIAN/LEMBAGA: KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

No	PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
		<ul style="list-style-type: none"> Terlaksananya pelatihan BDS bagi masyarakat dan pengusaha lokal/ daerah di kawasan transmigrasi (Pengembangan Ekonomi Lokal dan Daerah di Daerah Tertinggal) 	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah pelatihan BDS bagi masyarakat dan pengusaha lokal/daerah di kawasan transmigrasi 	3 kali	17 kali ^{KJ}	
		<ul style="list-style-type: none"> Terbentuknya forum lintas stakeholder terkait perencanaan dan penganggaran program/ kegiatan pengembangan ekonomi lokal dan daerah di kawasan transmigrasi (Pengembangan Ekonomi Lokal dan Daerah di Daerah Tertinggal) 	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah forum lintas stakeholder yang aktif. % jumlah stakeholder non pemerintah yang terlibat di dalam forum lintas stakeholder. 	5 20%	43 50% ^{KJ}	
		<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya penguatan kelembagaan perdesaan di permukiman transmigrasi (Pembangunan Perdesaan di Daerah Perbatasan) 	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah kelembagaan masyarakat yang mandiri 	10 lembaga	28 lembaga ^{KJ}	
		<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya kapasitas aparat dalam pengelolaan dan pelayanan bagi masyarakat di kawasan transmigrasi (Pembangunan Perdesaan di Daerah Perbatasan) 	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah aparat yang memiliki kapasitas pengelolaan dan pelayanan di Kawasan Transmigrasi 	26 kimtrans	107 kimtrans ^{KJ}	
		<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya kapasitas sumber daya manusia dalam proses pengembangan di kawasan transmigrasi (Pemba-ngunan Perdesaan di Daerah Perbatasan) 	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah fasilitasi kegiatan yang dilakukan; 	12 bln	60 bln ^{KJ}	
			<ul style="list-style-type: none"> Jumlah pelatihan dan pendampingan yang diberikan 	12 bln	60 bln ^{KJ}	
		<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya peran serta lintas sector, swasta dan masyarakat di kawasan transmigrasi (Pembangunan Perdesaan di Daerah Perbatasan) 	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah lintas sector yg berperan 	1 LS	33 LS ^{KJ}	
			<ul style="list-style-type: none"> Jumlah swasta / investor yang berperan 	2	10 ^{KJ}	
			<ul style="list-style-type: none"> Jumlah masyarakat transmigrasi yang berperan 	41.013 Kel	226.652 Kel ^{KJ}	
		<ul style="list-style-type: none"> Terciptanya pe-ningkatan kualitas dasar masyarakat di Kawasan Transmigrasi (Pembangunan Perdesaan di Daerah Perbatasan) 	<ul style="list-style-type: none"> Bantuan Pangan 	2.449 Kel	12.718 Kel ^{KJ}	
			<ul style="list-style-type: none"> Bantuan Pendidikan 	4.928 Kel	23.456 Kel ^{KJ}	
			<ul style="list-style-type: none"> Bantuan Kesehatan 	4.152 Kel	26.591 Kel ^{KJ}	
			<ul style="list-style-type: none"> Pelayanan Mental spiritual 	23 Kel	105 Kel ^{KJ}	

KEMENTERIAN/LEMBAGA: KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

No	PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
		<ul style="list-style-type: none"> ■ Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengembangan masyarakat dan kawasan transmigrasi (Pengembangan Ekonomi Lokal dan Daerah di Daerah Perbatasan) 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Jumlah pelatihan /Bintek/ Diseminasi/ studi Banding mengenai pengembangan ekonomi lokal dan daerah untuk aparatur pengelola kawasan transmigrasi 	1 kali	5 kali ^{KJ}	
		<ul style="list-style-type: none"> ■ Terlaksananya pelatihan BDS bagi masyarakat dan pengusaha lokal/ daerah di kawasan transmigrasi (Pengembangan Ekonomi Lokal dan Daerah di Daerah Perbatasan) 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Jumlah pelatihan BDS bagi masyarakat dan pengusaha lokal/daerah di kawasan transmigrasi 	1 kali	5 kali ^{KJ}	
		<ul style="list-style-type: none"> ■ Terbentuknya forum lintas stakeholder terkait perencanaan dan penganggaran program/ kegiatan pengembangan ekonomi lokal dan daerah di kawasan transmigrasi (Pengembangan Ekonomi Lokal dan Daerah di Daerah Perbatasan) 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Jumlah forum lintas stakeholder yang aktif. 	1	11 ^{KJ}	
			<ul style="list-style-type: none"> ■ % jumlah stakeholder non pemerintah yang terlibat di dalam forum lintas stakeholder. 	20%	50%	
		<ul style="list-style-type: none"> ■ Meningkatnya penguatan kelembagaan perdesaan di permukiman transmigrasi (Pembangunan Perdesaan di Wilayah Strategis) 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Jumlah kelembagaan masyarakat yang mandiri 	6 lembaga	43 lembaga ^{KJ}	
		<ul style="list-style-type: none"> ■ Meningkatnya kapasitas aparat dalam pengelolaan dan pelayanan bagi masyarakat di kawasan transmigrasi (Pembangunan Perdesaan di Wilayah Strategis) 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Jumlah aparat yang memiliki kapasitas pengelolaan dan pelayanan di Kawasan Transmigrasi 	77 UPT	385 UPT ^{KJ}	
		<ul style="list-style-type: none"> ■ Meningkatnya kapasitas sumber daya manusia dalam proses pengembangan di kawasan transmigrasi (Pembangunan Perdesaan di Wilayah Strategis) 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Jumlah pelatihan dan pendampingan yang diberikan 	12 kali	60 kali ^{KJ}	

KEMENTERIAN/LEMBAGA: KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

No	PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
		<ul style="list-style-type: none"> ■ Meningkatnya peran serta lintas sector, swasta dan masyarakat di kawasan transmigrasi (Pembangunan Perdesaan di Wilayah Strategis) 	■ Jumlah lintas sector yang berperan	6 Ls	43 Ls ^{KJ}	
			■ Jumlah swasta / investor yang berperan	11	69 ^{KJ}	
			■ Jumlah masyarakat transmigrasi yang berperan	10.254 Kel	56.666 Kel ^{KJ}	
		<ul style="list-style-type: none"> ■ Terciptanya peningkatan kualitas dasar masyarakat di Kawasan Transmigrasi (Pembangunan Perdesaan di Wilayah Strategis) 	■ Bantuan Pangan	4.082 Kel	24.964 Kel ^{KJ}	
			■ Bantuan Pendidikan	8.214 Kel	47.420 Kel ^{KJ}	
			■ Bantuan Kesehatan	10.254 Kel	56.666 Kel ^{KJ}	
			■ Pelayanan Mental spiritual	35 Kel	207 Kel ^{KJ}	
		<ul style="list-style-type: none"> ■ Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengembangan masyarakat dan kawasan transmigrasi (Pengembangan Ekonomi Lokal dan Daerah di Wilayah Strategis) 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Jumlah pelatihan /Bintek/ Diseminasi/ studi Banding mengenai pengembangan ekonomi lokal dan daerah untuk aparatur pengelola kawasan transmigrasi 	1 Kali	5 kali ^{KJ}	
				<ul style="list-style-type: none"> ■ Jumlah pelatihan BDS bagi masyarakat dan pengusaha lokal/daerah di kawasan transmigrasi (Pengembangan Ekonomi Lokal dan Daerah di Wilayah Strategis) 	1 Kali	
		<ul style="list-style-type: none"> ■ Terbentuknya forum lintas stakeholder terkait perencanaan dan penganggaran program/ kegiatan pengembangan ekonomi lokal dan daerah di kawasan transmigrasi (Pengembangan Ekonomi Lokal dan Daerah di Wilayah Strategis) 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Jumlah forum lintas stakeholder yang aktif. ■ % jumlah stakeholder non pemerintah yang terlibat di dalam forum lintas stakeholder. 	2 Forum	11 Forum ^{KJ}	
				20%	50%	

KEMENTERIAN/LEMBAGA: KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

No	PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
c.	Perencanaan Teknis Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya kualitas dan kese-suaian perencanaan teknis pe-ngembangan masyarakat dan kawasan transmigrasi (Pembangunan) 	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah sosialisasi perencanaan pengembangan masyarakat dan kawasan transmigrasi 	7 prov	16 prov	133,7
			<ul style="list-style-type: none"> Rencana Teknis Pembinaan Permukiman Transmigrasi 	10 kimtrans	114 kimtrans ^{ki)}	
			<ul style="list-style-type: none"> Rencana Teknis Pengembangan Masyarakat di Kawasan Transmigrasi 	6 Kws	23 Kws ^{ki)}	
			<ul style="list-style-type: none"> Rencana Teknis Pengembangan Kawasan Transmigrasi 	5 Kws	23 Kws ^{ki)}	
		<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi dan regu-lasi yang mendukung pengembangan kawasan transmigrasi sebagai kawasan Perkotaan Baru (Pengembangan Ekonomi Lokal dan Daerah di Daerah Tertinggal) 	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah MasterPlan, ActionPlan, dan Business Plan Wilayah Pembangunan Transmigrasi (WPT) 	1 Kws	5 Kws ^{ki)}	
			<ul style="list-style-type: none"> Prosentase MasterPlan, Action Plan, dan Business Plan Wilayah Pembangunan Transmigrasi (WPT) yang disahkan. 	100%	100%	
			<ul style="list-style-type: none"> Jumlah SDM Aparatur yang mampu mengelola kawasan perkotaan baru/KTM 	70 org	545 org ^{ki)}	
		<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya kualitas dan kesesuaian perencanaan teknis pengembangan masyarakat dan kawasan transmigrasi (Pembangunan Perdesaan di Daerah Perbatasan) 	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah sosialisasi perencanaan pengembangan masyarakat dan kawasan transmigrasi 	1 prov	10 prov ^{ki)}	
			<ul style="list-style-type: none"> Rencana Teknis Pembinaan Permukiman Transmigrasi 	2 kimtrans	16 kimtrans ^{ki)}	
			<ul style="list-style-type: none"> Rencana Teknis Pengembangan Masyarakat di Kawasan Transmigrasi 	1 Kws	3 Kws ^{ki)}	
			<ul style="list-style-type: none"> Rencana Teknis Pengembangan Kawasan Transmigrasi 	1 Kws	3 Kws ^{ki)}	

KEMENTERIAN/LEMBAGA: KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

No	PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
		<ul style="list-style-type: none"> ■ Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi dan regulasi yang mendukung pengembangan kawasan transmigrasi sebagai kawasan Perkotaan Baru (Pengembangan Ekonomi Lokal dan Daerah di Daerah Perbatasan) 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Jumlah MasterPlan, ActionPlan, dan Business Plan Wilayah Pembangunan Transmigrasi (WPT) 	1 Kws	5 Kws ^{KJ}	
			<ul style="list-style-type: none"> ■ Prosentase MasterPlan, Action Plan, dan Business Plan Wilayah Pembangunan Transmigrasi (WPT) yang disahkan. 	100,00%	100,00%	
			<ul style="list-style-type: none"> ■ Jumlah SDM Aparatur yang mampu mengelola kawasan perkotaan baru/KTM 	15 org	65 org ^{KJ}	
		<ul style="list-style-type: none"> ■ Meningkatnya kualitas dan kesesuaian perencanaan teknis pengembangan masyarakat dan kawasan transmigrasi di kawasan transmigrasi (Pembangunan Perdesaan di Wilayah Strategis) 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Jumlah sosialisasi perencanaan pengembangan masyarakat dan kawasan transmigrasi 	2 kali	10 kali ^{KJ}	
			<ul style="list-style-type: none"> ■ Rencana Teknis Pembinaan Permukiman Transmigrasi 	3 kimtrans	26 kimtrans ^{KJ}	
			<ul style="list-style-type: none"> ■ Rencana Teknis Pengembangan Masyarakat di Kawasan Transmigrasi 	1 Kws	5 Kws ^{KJ}	
			<ul style="list-style-type: none"> ■ Rencana Teknis Pengembangan Kawasan Transmigrasi 	2 Kws	6 Kws ^{KJ}	
			<ul style="list-style-type: none"> ■ Berkembangnya lahan usaha produksi pertanian di permukiman/kawasan transmigrasi (Pembangunan Perdesaan di Daerah Tertinggal) 	<ul style="list-style-type: none"> ■ jumlah lahan produktif di permukiman/kawasan transmigrasi 	5.654 Ha	
<ul style="list-style-type: none"> ■ Meningkatnya produktivitas desa dalam pengembangan pangan/ komoditas unggulan di kawasan transmigrasi (Pembangunan Perdesaan di Daerah Tertinggal) 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Jumlah produktivitas lahan di permukiman kawasan transmigrasi. 	8.934 Ton	43.384 Ton ^{KJ}			
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Meningkatnya kemampuan masyarakat dalam penerapan tekno-logi tepat guna dan penyerapan informasi pasar di kawasan transmigrasi (Pembangunan Perdesaan di Daerah Tertinggal) 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Jumlah usaha Pengolahan hasil 	13 Unit	91 Unit ^{KJ}		
		<ul style="list-style-type: none"> ■ Jumlah pasar desa 	11 bh	94 bh ^{KJ}		
		<ul style="list-style-type: none"> ■ Jumlah jaringan Pemasaran 	11 bh	95 bh ^{KJ}		
		<ul style="list-style-type: none"> ■ Jumlah kelompok usaha peternakan 	-	561 kel ^{KJ}		
<ul style="list-style-type: none"> ■ Jumlah Unit Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA) 	1 unit	5 unit ^{KJ}				

KEMENTERIAN/LEMBAGA: KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

No	PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
		<ul style="list-style-type: none"> ■ Meningkatnya pembiayaan bagi usaha mikro dan kecil menengah di kawasan transmigrasi (Pembangunan Perdesaan di Daerah Tertinggal) 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Jumlah bantuan skim kredit mikro di kawasan transmigrasi ■ Jumlah Lembaga ekonomi (koperasi /LKM-BMT Trans di permukiman transmigrasi) ■ jumlah kelompok tani di kawasan Transmigrasi 	1 SKIM	5 SKIM ^{KJ)}	
				32 Unit	279 unit ^{KJ)}	
				23 Kel	306 Kel ^{KJ)}	
		<ul style="list-style-type: none"> ■ Meningkatnya penciptaan usaha melalui iklim investasi yang kondusif di kawasan transmigrasi (Pembangunan Perdesaan di Daerah Tertinggal) 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Jumlah fasilitasi peningkatan iklim investasi kondusif yang menstimulasi peran serta aktif masyarakat dan dunia usaha (swasta) dalam pembangunan perdesaan di kawasan transmigrasi 	6 Kws	48 Kws ^{KJ)}	
			<ul style="list-style-type: none"> ■ Jumlah Skim Kredit untuk investasi 	1 SKIM	15 SKIM ^{KJ)}	
		<ul style="list-style-type: none"> ■ Peningkatan kemandirian masyarakat dalam pemenuhan pangan baik untuk produksi/ketersediaan, konsumsi pribadi maupun dijual kembali (pemasaran dan distribusi) di kawasan transmigrasi (Pembangunan Perdesaan di Daerah Tertinggal) 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Jumlah bimbingan, pendampingan, dan pelatihan kepada masyarakat dan pengembangan lahan di kawasan transmigrasi 	16 Kws	95 Kws ^{KJ)}	
		<ul style="list-style-type: none"> ■ Berkembangnya lembaga usaha ekonomi daerah, terutama di bidang permodalan dan perizinan usaha, di kawasan transmigrasi (Pengembangan Ekonomi Lokal di Daerah Tertinggal) 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Jumlah lembaga Perbankan/ keuangan di kawasan transmigrasi ■ Jumlah koperasi 	2 Kws	9 Kws ^{KJ)}	
				2 unit	9 unit ^{KJ)}	

KEMENTERIAN/LEMBAGA: KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

No	PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
		<ul style="list-style-type: none"> ■ Meningkatnya fasilitasi pengembangan usaha ekonomi kawasan transmigrasi sebagai kawasan perkotaan baru (Pengembangan Ekonomi Lokal di Daerah Tertinggal) 	■ Jumlah tenaga fasilitator di kawasan transmigrasi	328 org	1.983 org ^{KJ}	
			■ Jangka waktu penyelenggaraan fasilitasi di kawasan transmigrasi	12 Bln	60 Bln ^{KJ}	
			■ Jumlah pendampingan Pengembangan Usaha Ekonomi Kawasan	3 Unit	15 Unit ^{KJ}	
			■ Agrocenter	-	10 Kws ^{KJ}	
			■ Pengembangan Investasi swasta	2 Kws	13 Kws ^{KJ}	
			■ Jumlah Unit Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA)	2 Kws	11 Kws ^{KJ}	
		<ul style="list-style-type: none"> ■ Meningkatnya kualitas kerja sama antar daerah dan kemitraan pemerin-tah swasta dalam men-dukung pengembangan ekonomi kawasan (Pengembangan Ekonomi Lokal di Daerah Tertinggal) 	■ jumlah forum kerja sama antar daerah/wilayah	3 Forum	16 Forum ^{KJ}	
			■ jumlah sektor/bidang ekonomi yang dikerjasamakan	3 Sektor	16 Sektor ^{KJ}	
			■ Jumlah MoU sektor terkait	3	16 ^{KJ}	
		<ul style="list-style-type: none"> ■ Berkembangnya lahan usaha produksi pertanian di permukiman/kawasan transmigrasi (Pembangunan Perdesaan di Daerah Perbatasan) 	■ jumlah lahan produktif di permukiman/kawasan transmigrasi	998 Ha	3.256 Ha ^{KJ}	
			■ Meningkatnya produktivitas desa dalam pengembangan pangan/ komoditas unggulan di kawasan transmigrasi (Pembangunan Perdesaan di Daerah Perbatasan)	■ Jumlah produktivitas lahan di permukiman kawasan transmi-grasi.	1.577 Ton	
		<ul style="list-style-type: none"> ■ Meningkatnya kemampuan masyarakat dalam penerapan tekno-logi tepat guna dan penyerapan informasi pasar di kawasan transmigrasi (Pembangunan Perdesaan di 	■ Jumlah usaha Pengolahan hasil	3 Unit	12 Unit ^{KJ}	
			■ Jumlah pasar desa	2 bh	14 bh ^{KJ}	
			■ Jumlah jaringan Pemasaran	2 bh	14 bh ^{KJ}	
			■ Jumlah kelompok usaha peternakan	-	79 kel ^{KJ}	
		<ul style="list-style-type: none"> ■ Meningkatnya pembiayaan bagi usaha mikro dan kecil menengah di kawasan transmigrasi (Pembangunan Perdesaan di Daerah Perbatasan) 	■ Jumlah bantuan skim kredit mikro di kawasan transmigrasi	0 SKIM	0 SKIM ^{KJ}	
			■ Jumlah Lembaga ekonomi (koperasi /LKM-BMT Trans di permukiman transmigrasi)	6 Unit	39 unit ^{KJ}	

KEMENTERIAN/LEMBAGA: KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

No	PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
			■ jumlah kelompok tani di kawasan Transmigrasi	5 Kel	42 Kel ^{KJ}	
		■ Meningkatnya penciptaan usaha melalui iklim investasi yang kondusif di kawasan transmigrasi (Pembangunan Perdesaan di Daerah Perbatasan)	■ Jumlah fasilitasi peningkatan iklim investasi kondusif yang menstimulasi peran serta aktif masyarakat dan dunia usaha (swasta) dalam pembangunan perdesaan di kawasan transmigrasi	2 Kws	12 Kws ^{KJ}	
			■ Jumlah Skim Kredit untuk investasi	0 SKIM	4 SKIM ^{KJ}	
		■ Peningkatan kemandirian masyarakat dalam pemenuhan pangan baik untuk produksi/ketersediaan, konsumsi pribadi maupun dijual kembali (pemasaran dan distribusi) di kawasan transmigrasi (Pembangunan Perdesaan di Daerah Perbatasan)	■ Jumlah bimbingan, pendampingan, dan pelatihan kepada masyarakat dan pengembangan lahan di kawasan transmigrasi	2 Kws	11 Kws ^{KJ}	
		■ Berkembangnya lembaga usaha ekonomi daerah, terutama di bidang permodalan dan perizinan usaha, di kawasan transmigrasi (Pengembangan Ekonomi Lokal di Daerah Perbatasan)	■ Jumlah lembaga Perbankan/ keuangan di kawasan transmigrasi	1 Kws	5 Kws ^{KJ}	
			■ Jumlah koperasi	2 unit	7 unit ^{KJ}	
		■ Meningkatnya fasilitasi pengembangan usaha ekonomi kawasan transmigrasi sebagai kawasan perkotaan baru (Pengembangan Ekonomi Lokal di Daerah Perbatasan)	■ Jumlah tenaga fasilitator di kawasan transmigrasi	80 org	425 org ^{KJ}	
			■ Jangka waktu penyelenggaraan fasilitasi di kawasan transmigrasi	12 Bln	60 Bln ^{KJ}	
			■ Jumlah pendampingan Pengembangan Usaha Ekonomi Kawasan	1 Unit	5 Unit ^{KJ}	
			■ Agrocenter	-	4 Kws ^{KJ}	
			■ Pengembangan Investasi swasta	1 Kws	5 Kws ^{KJ}	
			■ Jumlah Unit Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA)	1 Kws	5 Kws ^{KJ}	

KEMENTERIAN/LEMBAGA: KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

No	PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
		<ul style="list-style-type: none"> ■ Meningkatnya kualitas kerja sama antar daerah dan kemitraan pemerin-tah swasta dalam mendukung pengembangan ekonomi kawasan (Pengembangan Ekonomi Lokal di Daerah Perbatasan) 	<ul style="list-style-type: none"> ■ jumlah forum kerja sama antar daerah/wilayah 	1 Forum	5 Forum ^{KJ}	
			<ul style="list-style-type: none"> ■ jumlah sektor/bidang ekonomi yang dikerjasamakan 	1 Sektor	5 Sektor ^{KJ}	
			<ul style="list-style-type: none"> ■ Jumlah MoU sektor terkait 	1	5 ^{KJ}	
		<ul style="list-style-type: none"> ■ Berkembangnya lahan usaha produksi pertanian di permukiman/ kawasan transmigrasi (Pembangunan Perdesaan di Wilayah Strategis) 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Jumlah lahan produktif di permukiman/kawasan transmigrasi 	2.778 Ha	7.792 Ha ^{KJ}	
		<ul style="list-style-type: none"> ■ Meningkatnya produktivitas desa dalam pengembangan pangan/ komoditas unggulan di kawasan transmigrasi (Pembangunan Perdesaan di Wilayah Strategis) 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Produktivitas lahan di permukiman/ kawasan transmigrasi 	3.878 Ton	13.666 Ton ^{KJ}	
		<ul style="list-style-type: none"> ■ Meningkatnya kemampuan masyarakat dalam penerapan tekno-logi tepat guna dan penyerapan informasi pasar di kawasan transmigrasi (Pembangunan Perdesaan di Wilayah Strategis) 	<ul style="list-style-type: none"> ■ jumlah usaha Pengolahan hasil 	4 unit	26 unit ^{KJ}	
			<ul style="list-style-type: none"> ■ Jumlah pasar desa 	3 bh	27 bh ^{KJ}	
			<ul style="list-style-type: none"> ■ Jumlah jaringan Pemasaran 	3 bh	27 bh ^{KJ}	
			<ul style="list-style-type: none"> ■ Jumlah kelompok usaha peternakan 	-	16 kel ^{KJ}	
		<ul style="list-style-type: none"> ■ Meningkatnya pembiayaan bagi usaha mikro dan kecil menengah di kawasan transmigrasi (Pembangunan Perdesaan di Wilayah Strategis) 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Jumlah bantuan skim kredit mikro di kawasan transmigrasi 	1 Kws	5 Kws ^{KJ}	
			<ul style="list-style-type: none"> ■ Jumlah Lembaga ekonomi (koperasi /LKM-BMT Trans di permukiman transmigrasi) 	10 Unit	82 unit ^{KJ}	
			<ul style="list-style-type: none"> ■ jumlah kelompok tani di kawasan Transmigrasi 	35 Kel	435 Kel ^{KJ}	
		<ul style="list-style-type: none"> ■ Meningkatnya penciptaan usaha melalui iklim investasi yang kondusif di kawasan transmigrasi (Pembangunan Perdesaan di Wilayah Strategis) 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Jumlah fasilitasi peningkatan iklim investasi kondusif yang menstimulasi peran serta aktif masyarakat dan dunia usaha (swasta) dalam pembangunan perdesaan termasuk di daerah transmigrasi 	2 Kws	15 Kws ^{KJ}	

KEMENTERIAN/LEMBAGA: KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

No	PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
		<ul style="list-style-type: none"> ■ Peningkatan kemandirian masyarakat dalam pemenuhan pangan baik untuk produksi/keter-sediaan, konsumsi pribadi maupun dijual kembali (pemasaran dan distribusi) di kawasan transmigrasi (Pembangunan Perdesaan di Wilayah Strategis) 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Jumlah bimbingan, pendampingan, dan pelatihan kepada masyarakat dan pengembangan lahan di kawasan transmigrasi 	4 kali	23 kali ^{KJ}	
		<ul style="list-style-type: none"> ■ Berkembangnya lembaga usaha ekonomi daerah, terutama di bidang permodalan dan perizinan usaha, di kawasan transmigrasi 	<ul style="list-style-type: none"> · Jumlah lembaga Perbankan/keuangan · Jumlah koperasi 	1 unit	5 unit ^{KJ}	
		<ul style="list-style-type: none"> ■ Meningkatnya fasilitasi pengembangan usaha ekonomi kawasan transmigrasi sebagai kawasan perkotaan baru (Pengembangan Ekonomi Lokal dan Daerah di Wilayah Strategis) 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Jumlah tenaga fasilitator di kawasan transmigrasi 	146 org	699 org ^{KJ}	
			<ul style="list-style-type: none"> ■ Jangka waktu penyelenggaraan fasilitasi di kawasan transmigrasi 	12 Bln	60 Bln ^{KJ}	
			<ul style="list-style-type: none"> ■ Jumlah pendampingan Pengembangan Usaha Ekonomi Kawasan 	4 Unit	20 Unit ^{KJ}	
			<ul style="list-style-type: none"> ■ Agrocenter 	1 Kws	3 Kws ^{KJ}	
			<ul style="list-style-type: none"> ■ Jumlah Unit Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA) 	1 Kws	3 Kws ^{KJ}	
		<ul style="list-style-type: none"> ■ Meningkatnya kualitas kerja sama antar daerah dan kemitraan pemerintah swasta dalam mendukung pengembangan ekonomi kawasan (Pengembangan Ekonomi Lokal dan Daerah di Wilayah Strategis) 	<ul style="list-style-type: none"> ■ jumlah forum kerja sama antar daerah/wilayah 	2	7 ^{KJ}	
			<ul style="list-style-type: none"> ■ jumlah sektor/ bidang ekonomi yang dikerja samakan 	1 Sektor	8 Sektor ^{KJ}	
			<ul style="list-style-type: none"> ■ Jumlah MoU sektor terkait 	1	8 ^{KJ}	
e.	Pengembangan Sarana dan Prasarana Kawasan Transmigrasi	<ul style="list-style-type: none"> ■ Meningkatnya fungsi dan ketersediaan sarana prasarana di kawasan transmigrasi (Pembangunan Perdesaan di Daerah Tertinggal) 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Pengembangan Jalan 	120 Km	483,56 Km ^{KJ}	899,4
			<ul style="list-style-type: none"> ■ Pengembangan Drainase 	14,4 Km	47,84 Km ^{KJ}	
			<ul style="list-style-type: none"> ■ Pengembangan Sarana Air Bersih 	3.150.000 liter	13.446.361 liter ^{KJ}	
			<ul style="list-style-type: none"> ■ Pengembangan Energi Terbarukan 	-	71.200 Watt ^{KJ}	
			<ul style="list-style-type: none"> ■ Pengembangan Bangunan Fasiitas Umum 	32 Unit	190 Unit ^{KJ}	
			<ul style="list-style-type: none"> ■ Rehabilitasi Rumah Transmigran 	700 Unit	1.680 Unit ^{KJ}	

KEMENTERIAN/LEMBAGA: KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

No	PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
		■ Meningkatnya akses terhadap sarana dan prasarana kawasan transmigrasi pada kawasan tertinggal (Pengembangan Ekonomi Lokal dan Daerah di Daerah Tertinggal)	■ Pengembangan jalan	9,2 km	62,65 km	KJ
			■ Pengembangan drainase	13 km	47 km	KJ
			■ Pengembangan Sarana Air Bersih	5.555.556 liter	29.042.735 liter	KJ
			■ Pengembangan Energi Terbarukan	176.457 watt	486.906 watt	KJ
			■ Pengembangan Fasilitas Umum	3 unit	56 unit	KJ
		■ Meningkatnya fungsi dan ketersediaan sarana prasarana di kawasan transmigrasi (Pembangunan Perdesaan di Daerah Perbatasan)	■ Pengembangan Jalan	12 Km	54 Km	KJ
			■ Pengembangan Drainase	2 Km	6,4 Km	KJ
			■ Pengembangan Sarana Air Bersih	787.500 Liter	2.326.430 Liter	KJ
			■ Pengembangan Energi Terbarukan	-	8.152 Watt	KJ
			■ Pengembangan Bangunan Fasilitas Umum	29 Unit	48 Unit	KJ
	■ Meningkatnya akses terhadap sarana dan prasarana kawasan transmigrasi pada kawasan perbatasan (Pengembangan Ekonomi Lokal dan Daerah di Daerah Perbatasan)	■ Pengembangan jalan	4 km	10,1 km	KJ	
		■ Pengembangan drainase		7 km	KJ	
		■ Pengembangan Sarana Air Bersih		3.333.334 liter	KJ	
		■ Pengembangan Energi Terbarukan		23.810 watt	KJ	
		■ Pengembangan Fasilitas Umum	3 unit	11 unit	KJ	
	■ Meningkatnya fungsi dan ketersediaan sarana prasarana di kawasan transmigrasi pada kawasan strategis (Pembangunan Perdesaan di Wilayah Strategis)	■ Pengembangan Jalan	30 Km	120,894 Km	KJ	
		■ Pengembangan Drainase	3,6 Km	11,96 Km	KJ	
		■ Pengembangan Sarana Air Bersih	787.500 Liter	2.326.430 Liter	KJ	
		■ Pengembangan Energi Terbarukan	-	17.800 Watt	KJ	
		■ Pengembangan Bangunan Fasilitas Umum	48 Unit	88 Unit	KJ	
	■ Meningkatnya akses terhadap sarana dan prasarana kawasan transmigrasi pada kawasan strategis (Pengembangan Ekonomi Lokal dan	■ Pengembangan jalan	21,38 km	36,28 km	KJ	
		■ Pengembangan drainase		9 km	KJ	
		■ Pengembangan Sarana Air Bersih		4.666.667 liter	KJ	
		■ Pengembangan Energi Terbarukan		23.810 watt	KJ	
		■ Pengembangan Fasilitas Umum	6 unit	26 unit	KJ	

KEMENTERIAN/LEMBAGA: KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

No	PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
f.	Penyerasian Lingkungan di kawasan transmigrasi	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya pengelolaan dan pemanfaatan lingkungan dalam mendukung kelestarian fungsi lingkungan hidup di kawasan transmigrasi (Pembangunan Perdesaan di Daerah Tertinggal) 	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah dokumen pengelolaan lingkungan hidup di kawasan transmigrasi 	24 Dok	112 Dok ^{KJ}	465,8
			<ul style="list-style-type: none"> Jumlah mitigasi lingkungan 	13 kimtrans	94 kimtrans ^{KJ}	
			<ul style="list-style-type: none"> Jumlah fasilitasi dan advokasi penyerasian lingkungan 	5 Pkt	20 Pkt ^{KJ}	
		<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya kemandirian masyarakat di permukiman transmigrasi pada kawasan tertinggal (Pembangunan Perdesaan di Daerah Tertinggal) 	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah permukiman transmigrasi yang mandiri 	12 kimtrans	132 kimtrans ^{KJ}	
		<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya Desa Mandiri Energi dikawasan Transmigrasi (Pembangunan Perdesaan di Daerah Tertinggal) 	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah permukiman transmigrasi yang akan berkembang menjadi Desa Mandiri Energi 	1 kimtrans	5 kimtrans ^{KJ}	
		<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya kelestarian dan fungsi lingkungan hidup di kawasan transmigrasi (Pembangunan Perdesaan di Daerah Tertinggal) 	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah dokumen pengelolaan lingkungan 	1 Dok	8 Dok ^{KJ}	
			<ul style="list-style-type: none"> Jumlah Evaluasi Perkembangan Kawasan Transmigrasi 	-	44 Kws ^{KJ}	
			<ul style="list-style-type: none"> Jumlah mitigasi lingkungan 	7 Kws	22 Kws ^{KJ}	
		<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya pengelolaan dan pemanfaatan lingkungan dalam mendukung kelestarian fungsi lingkungan hidup di kawasan transmigrasi (Pembangunan Perdesaan di Daerah Perbatasan) 	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah dokumen pengelolaan lingkungan hidup di kawasan transmigrasi 	4 Dok	26 Dok ^{KJ}	
		<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya kemandirian masyarakat di permukiman transmigrasi pada kawasan tertinggal (Pembangunan Perdesaan di Daerah Perbatasan) 	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah mitigasi lingkungan 	2 Kimtrans	16 Kimtrans ^{KJ}	
			<ul style="list-style-type: none"> Jumlah fasilitasi dan advokasi penyerasian lingkungan 	1 Pkt	5 Pkt ^{KJ}	
		<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya kemandirian masyarakat di permukiman transmigrasi pada kawasan tertinggal (Pembangunan Perdesaan di Daerah Perbatasan) 	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah permukiman transmigrasi yang mandiri 	2 Kimtrans	21 Kimtrans ^{KJ}	
		<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya Desa Mandiri Energi dikawasan Transmigrasi (Pembangunan Perdesaan di Daerah Perbatasan) 	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah permukiman transmigrasi yang akan berkembang menjadi Desa Mandiri Energi 	1 Kimtrans	5 Kimtrans ^{KJ}	

KEMENTERIAN/LEMBAGA: KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

No	PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
		<ul style="list-style-type: none"> ■ Meningkatnya kelestarian dan fungsi lingkungan hidup di kawasan transmigrasi (Pembangunan Perdesaan di Daerah Perbatasan) 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Jumlah dokumen pengelolaan lingkungan 	1 Dok	5 Dok ^{ki)}	
			<ul style="list-style-type: none"> ■ Jumlah Evaluasi Perkembangan Kawasan Transmigrasi 	-	12 Kws ^{ki)}	
			<ul style="list-style-type: none"> ■ Jumlah mitigasi lingkungan 	2 Kws	9 Kws ^{ki)}	
		<ul style="list-style-type: none"> ■ Meningkatnya pengelolaan dan pemanfaatan lingkungan dalam mendukung kelestarian fungsi lingkungan hidup di kawasan transmigrasi (Pembangunan Perdesaan di Wilayah Strategis) 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Jumlah dokumen pengelolaan lingkungan hidup di kawasan transmigrasi 	6 Dok	28 Dok ^{ki)}	
			<ul style="list-style-type: none"> ■ Jumlah mitigasi lingkungan 	3 Kimtrans	25 Kimtrans ^{ki)}	
		<ul style="list-style-type: none"> ■ Meningkatnya kemandirian masyarakat di permukiman transmigrasi pada kawasan tertinggal (Pembangunan Perdesaan di Wilayah Strategis) 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Jumlah permukiman transmigrasi yang mandiri 	4 Kimtrans	38 Kimtrans ^{ki)}	
		<ul style="list-style-type: none"> ■ Meningkatnya kelestarian dan fungsi lingkungan hidup di kawasan transmigrasi (Pembangunan Perdesaan di Wilayah Strategis) 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Jumlah dokumen pengelolaan lingkungan 	1 Dok	12 Dok ^{ki)}	
			<ul style="list-style-type: none"> ■ Jumlah Evaluasi Perkembangan Kawasan Transmigrasi 	-	12 Kws ^{ki)}	
			<ul style="list-style-type: none"> ■ Jumlah mitigasi lingkungan 	1 Kws	9 Kws ^{ki)}	

KEMENTERIAN/LEMBAGA: KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

No	PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
IX	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi					3.816,2
a.	Dukungan teknis dan manajemen Ditjen P4Trans	Tersedianya dukungan manajemen dan teknis terhadap pelaksanaan pembangunan transmigrasi dan perpindahan transmigrasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersusunnya Program dan anggaran pd setiap satuan kerja 2. Terwujudnya pelaksanaan anggaran dan penyusunan laporan 3. Tersedianya sarana dan prasana kerja bagi 6 satker 4. Peningkatan kompetensi pegawai sesuai dgn kebutuhan organisasi 5. Tersedianya Norma, standar, Kriteria dan prosedur (NSPK) 	12	60 bulan ^{KJ}	426,9
b.	Pengembangan Peran Serta Masyarakat dalam pembangunan transmigrasi	Meningkatnya peranserta masyarakat dalam pembangunan transmigrasi dalam rangka pembangunan perdesaan di daerah tertinggal	■ Instansi yang bekerjasama mendukung program transmigrasi	16 lembaga	80 lembaga ^{KJ}	130,4
			■ Kabupaten/Kota yang bersedia melaksanakan pembangunan transmigrasi	96 kab	104 kab	
			■ Minat masyarakat untuk mengikuti program transmigrasi	19.600 kel	106.030 kel ^{KJ}	
			■ Kesepakatan bersama antar Prov dan Perjanjian KSAD antar Kab/Kota	23 kab	26 kab	
			■ Nilai rencana investasi yang akan dikembangkan oleh Badan Usaha	1,4 trilyun	8,8 trilyun ^{KJ}	
			■ Instansi yang bekerjasama mendukung program transmigrasi	16 lembaga	80 lembaga ^{KJ}	
		Meningkatnya peranserta masyarakat dalam pembangunan transmigrasi dalam rangka	■ Kabupaten/Kota yang bersedia melaksanakan pembangunan transmigrasi	96 kab	104 kab	
			■ Minat masyarakat untuk mengikuti program transmigrasi	19.600 kel	106.030 kel ^{KJ}	
			■ Kesepakatan bersama antar Prov dan Perjanjian KSAD antar Kab/Kota	23 kab	26 kab	
			■ Nilai rencana investasi yang akan dikembangkan oleh Badan Usaha	1,4 trilyun	8,8 trilyun ^{KJ}	

KEMENTERIAN/LEMBAGA: KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

No	PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
		Meningkatnya perantara masyarakat dalam pembangunan transmigrasi dalam rangka pembangunan perdesaan di wilayah strategis	<ul style="list-style-type: none"> ■ Instansi yang bekerjasama mendukung program transmigrasi ■ Kabupaten/Kota yang bersedia melaksanakan pembangunan transmigrasi ■ Minat masyarakat untuk mengikuti program transmigrasi ■ Kesepakatan bersama antar Prov dan Perjanjian KSAD antar Kab/Kota ■ Nilai rencana investasi yang akan dikembangkan oleh Badan Usaha 	<ul style="list-style-type: none"> 4 lembaga 24 kab 4.900 kel 6 kab 0,4 trilyun 	<ul style="list-style-type: none"> 20 lembaga ^{kl)} 26 kab 26.530 kel ^{kl)} 7 kab 2,7 trilyun ^{kl)} 	
c.	Penyediaan Tanah Transmigrasi	<p>Tersedianya lahan untuk pembangunan Kawasan Transmigrasi dalam rangka pembangunan perdesaan di daerah tertinggal</p> <p>■ Tersedianya lahan untuk pembangunan Kawasan Transmigrasi dalam rangka pembangunan perdesaan di daerah perbatasan</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ Luas lahan yang tersedia (Ha) ■ Luas lahan yang didukung oleh legalitas ■ Luas lahan yang dibagikan ■ Data tentang bidang tanah yang dibagikan transmigran ■ Jumlah dan jenis dokumen pertanahan ■ Prosentase penyelesaian kasus pertanahan ■ Luas lahan yang tersedia (Ha) ■ Luas lahan yang didukung oleh legalitas ■ Luas lahan yang dibagikan ■ Data tentang bidang tanah yang dibagikan transmigran ■ Jumlah dan jenis dokumen pertanahan ■ Prosentase penyelesaian kasus pertanahan 	<ul style="list-style-type: none"> 48000 Ha 15360 Ha 7860 Ha 26 lok 2 dok 15% 32000 Ha 10240 Ha 5240 Ha 17 lok 2 dok 15% 	<ul style="list-style-type: none"> 240.000 Ha ^{kl)} 84.316 Ha ^{kl)} 42.420 Ha ^{kl)} 137 lok ^{kl)} 10 dok ^{kl)} 20% 160.000 Ha ^{kl)} 55.984 Ha ^{kl)} 28.280 Ha ^{kl)} 91 lok ^{kl)} 10 dok ^{kl)} 20% 	192,7

KEMENTERIAN/LEMBAGA: KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

No	PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
		<ul style="list-style-type: none"> ■ Tersedianya lahan untuk pembangunan Kawasan Transmigrasi dalam rangka pembangunan perdesaan di wilayah Strategis 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Luas lahan yang tersedia (Ha) ■ Luas lahan yang didukung oleh legalitas ■ Luas lahan yang dibagikan ■ Data tentang bidang tanah yang dibagikan transmigran ■ Jumlah dan jenis dokumen pertanahan ■ Prosentase penyelesaian kasus pertanahan 	<ul style="list-style-type: none"> 20000 Ha 6400 Ha 3226 Ha 15 lok 2 dok 15% 	<ul style="list-style-type: none"> 100.000 Ha ^{kJ)} 35.240 Ha ^{kJ)} 17646 Ha ^{kJ)} 75 Lok ^{kJ)} 10 dok ^{kJ)} 15% 	
d.	Penyusunan Rencana Pembangunan Kawasan Transmigrasi dan Penempatan Transmigrasi	Tersedianya rencana pembangunan Kawasan Transmigrasi dan rencana penataan persebaran penduduk di Kawasan Transmigrasi dalam rangka pembangunan perdesaan di daerah tertinggal	<ul style="list-style-type: none"> ■ Rencana Wilayah Pengembangan Transmigrasi (WPT) dan Rencana Detail Pusat WPT ■ Rencana Kawasan Pengembangan Transmigrasi (SKP) ■ Rencana Teknis Permukiman/redesain tata ruang perdesaan terintegrasi dengan Kawasan Transmigrasi ■ Rencana Teknis Sarana dan Prasarana Permukiman Transmigrasi ■ Rencana Teknis Pengembangan SDM dan Penataan Persebaran Penduduk di Kawasan Transmigrasi ■ Rencana Teknis Detail Desain Sarana dan Prasarana Pusat Kawasan Perkotaan Baru ■ Data Potensi sasaran pengarah dan perpindahan transmigrasi 	<ul style="list-style-type: none"> 3 WPT 4 SKP 13 SP 2 RT SAPRAS 4 SKP 3 DED 12 Kab 	<ul style="list-style-type: none"> 18 WPT ^{kJ)} 39 SKP ^{kJ)} 122 SP ^{kJ)} 23 RT SARPRAS ^{kJ)} 40 SKP ^{kJ)} 20 DED ^{kJ)} 12 Kab 	111,6

KEMENTERIAN/LEMBAGA: KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

No	PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
		Tersedianya rencana pembangunan Kawasan Transmigrasi dan rencana penataan persebaran penduduk di Kawasan Transmigrasi dalam rangka pembangunan perdesaan di daerah perbatasan	<ul style="list-style-type: none"> ■ Rencana Wilayah Pengembangan Transmigrasi (WPT) dan Rencana Detail Pusat WPT ■ Rencana Kawasan Pengembangan Transmigrasi (SKP) ■ Rencana Teknis Permukiman/redesain tata ruang perdesaan terintegrasi dengan Kawasan Transmigrasi ■ Rencana Teknis Sarana dan Prasarana Permukiman Transmigrasi ■ Rencana Teknis Pengembangan SDM dan Penataan Persebaran Penduduk di Kawasan Transmigrasi ■ Rencana Teknis Detail Desain Sarana dan Prasarana Pusat Kawasan Perkotaan Baru ■ Data Potensi sasaran pengarah dan perpindahan transmigrasi 	<ul style="list-style-type: none"> 2 WPT 3 SKP 9 SP 1 RT SARPRAS 3 SKP 2 DED 12 Kab 	<ul style="list-style-type: none"> 12 WPT ^{KJ} 27 SKP ^{KJ} 81 SP ^{KJ} 14 RT SARPRAS ^{KJ} 28 SKP ^{KJ} 13 DED ^{KJ} 12 Kab ^{KJ} 	
		Tersedianya rencana pembangunan Kawasan Transmigrasi dan rencana penataan persebaran penduduk di Kawasan Transmigrasi dalam rangka pembangunan perdesaan di kawasan strategis	<ul style="list-style-type: none"> ■ Rencana Wilayah Pengembangan Transmigrasi (WPT) dan Rencana Detail Pusat WPT ■ Rencana Kawasan Pengembangan Transmigrasi (SKP) ■ Rencana Teknis Permukiman/redesain tata ruang perdesaan terintegrasi dengan Kawasan Transmigrasi ■ Rencana Teknis Sarana dan Prasarana Permukiman Transmigrasi ■ Rencana Teknis Pengembangan SDM dan Penataan Persebaran Penduduk di Kawasan Transmigrasi 	<ul style="list-style-type: none"> 1 WPT 1 SKP 5 SP 1 RT SAPRAS 1 SKP 	<ul style="list-style-type: none"> 7 WPT ^{KJ} 16 SKP ^{KJ} 50 SP ^{KJ} 9 RT SARPRAS ^{KJ} 16 SKP ^{KJ} 	

KEMENTERIAN/LEMBAGA: KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

No	PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
			<ul style="list-style-type: none"> ■ Rencana Teknis Detail Desain Sarana dan Prasarana Pusat Kawasan Perkotaan Baru ■ Data Potensi sasaran pengarah dan perpindahan transmigrasi 	1 DED	7 DED ^{K)}	
				3 Kab	3 Kab	
e.	Pembangunan Permukiman di Kawasan Transmigrasi	<p>Termanfaat dan terkelolanya sumberdaya alam dan lingkungan hidup melalui pembangunan Kawasan Transmigrasi dalam bentuk WPT atau LPT yang layak dalam rangka pembangunan perdesaan di daerah tertinggal</p> <p>Termanfaat dan terkelolanya sumberdaya alam dan lingkungan hidup melalui pembangunan Kawasan Transmigrasi dalam bentuk WPT atau LPT yang layak dalam rangka pembangunan perdesaan di daerah perbatasan</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ Lahan yang dibuka (Ha) ■ Jalan antar SKP, antar permukiman dan jalan lingkungan permukiman transmigrasi ■ Rumah Transmigran dan Jamban Keluarga (RTJK) yang dibangun (Unit) ■ Rumah penduduk setempat yang dipugar/dikembang-kan (Unit) ■ Fasilitas Umum/ Fasilitas Sosial yang dibangun/dikem-bangkan (Unit) ■ Sarana Air Bersih dan Sanitasi yang dibangun (Paket) ■ Sarana dan Prasarana Kawasan Perkotaan Baru Yang di siapkan ■ Luas Lahan Siap Bangun di Pusat Kawasan Perkotaan Baru 	3.571 ha	28.087 ha ^{K)}	2.572,4
				7,99 km	505,05 km ^{K)}	
				3.926 unit	24.230 unit ^{K)}	
				576 unit	3.199 unit ^{K)}	
				12 unit	84 unit ^{K)}	
				912 unit	5.098 unit ^{K)}	
				9 SAPRAS	57 SARPRAS ^{K)}	
				180 ha	1.140 ha ^{K)}	
			<ul style="list-style-type: none"> ■ Lahan yang dibuka (Ha) ■ Jalan antar SKP, antar permukiman dan jalan lingkungan permukiman transmigrasi ■ Rumah Transmigran dan Jamban Keluarga (RTJK) yang dibangun (Unit) ■ Rumah penduduk setempat yang dipugar/dikembang-kan (Unit) ■ Fasilitas Umum/ Fasilitas Sosial yang dibangun/dikem-bangkan (Unit) ■ Sarana Air Bersih dan Sanitasi yang dibangun (Paket) ■ Sarana dan Prasarana Kawasan Perkotaan Baru Yang di siapkan ■ Luas Lahan Siap Bangun di Pusat Kawasan Perkotaan Baru 	2.381 ha	18.725 ha ^{K)}	
				5,33 km	336,71 km ^{K)}	
				2.480 unit	12.964 unit ^{K)}	
				384 unit	2.133 unit ^{K)}	
				8 unit	56 unit ^{K)}	
				608 unit	3.399 unit ^{K)}	
				6 SAPRAS	36 SARPRAS ^{K)}	
				120 ha	760 ha ^{K)}	

KEMENTERIAN/LEMBAGA: KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

No	PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
		Termanfaatkan dan terkelolanya sumberdaya alam dan lingkungan hidup melalui pembangunan Kawasan Transmigrasi dalam bentuk WPT atau LPT yang layak dalam rangka pembangunan perdesaan di kawasan strategis	<ul style="list-style-type: none"> ■ Lahan yang dibuka (Ha) ■ Jalan antar SKP dalam Kawasan Transmigrasi § Jalan antar Permu-kiman dalam SKP § Jalan lingkungan dalam Permukiman (Km) ■ Rumah Transmigran dan Jamban Keluarga (RTJK) yang dibangun (Unit) ■ Rumah penduduk setempat yang dipugar/dikembang-kan (Unit) ■ Fasilitas Umum/ Fasilitas Sosial yang dibangun/dikem-bangkan (Unit) ■ Sarana Air Bersih dan Sanitasi yang dibangun (Paket) ■ Sarana dan Prasarana Kawasan Perkotaan Baru Yang di siapkan ■ Luas Lahan Siap Bangun di Pusat Kawasan Perkotaan Baru 	<ul style="list-style-type: none"> 3.225,6 ha 0 km 0 km 34,68 km 1.448 unit 315 unit 5 unit 391 unit 1.898 pkt 30 ha 	<ul style="list-style-type: none"> 15.696,4 Ha ^(K) 64,2 km ^(K) 116,8 ^(K) 359,12 km ^(K) 8.038 unit ^(K) 1.653 unit ^(K) 30 unit ^(K) 3.008 unit ^(K) 11.346 pkt ^(K) 182 Ha ^(K) 	
f.	Fasilitasi perpindahan dan penempatan transmigrasi	<p>Terwujudnya persebaran penduduk yang serasi dengan daya dukung sumberdaya alam dan daya tampung lingkungan hidup di Kawasan Transmigrasi dalam rangka pembangunan perdesaan di daerah tertinggal</p> <p>Terwujudnya persebaran penduduk yang serasi dengan daya dukung sumberdaya alam dan daya tampung lingkungan hidup di Kawasan Transmigrasi dalam rangka pembangunan perdesaan di daerah perbatasan</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ Jumlah keluarga yang difasilitasi perpindahannya ke Kawasan Transmigrasi ■ Jumlah keluarga penduduk yang tertata terintegrasi dalam Kawasan Transmigrasi ■ Data administrasi kependudukan masyarakat di Kawasan Transmigrasi ■ Jumlah bantuan perbekalan yang diberikan kepada calon transmigran ■ Jumlah fasilitasi pelatihan calon transmigran ■ Jumlah keluarga yang difasilitasi perpindahannya ke Kawasan Transmigrasi ■ Jumlah keluarga penduduk yang tertata terintegrasi dalam Kawasan Transmigrasi ■ Data administrasi kependudukan masyarakat di Kawasan Transmigrasi 	<ul style="list-style-type: none"> 3.926 kel 11.615 kel 3.926 kel 3.926 kel 131 Aktn 2.617 kel 7.744 kel 2.617 kel 	<ul style="list-style-type: none"> 21.230 kel ^(K) 63.527 kel ^(K) 21.230 kel ^(K) 21.230 kel ^(K) 708 Aktn ^(K) 14.153 kel ^(K) 42.352 kel ^(K) 14.153 kel ^(K) 	382,1

KEMENTERIAN/LEMBAGA: KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

No	PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
			■ Jumlah bantuan perbekalan yang diberikan kepada calon transmigran	2.617 kel	14.149 kel ^{K)}	
			■ Jumlah fasilitasi pelatihan calon transmigran	87 Aktn	472 Aktn ^{K)}	
		Terwujudnya persebaran penduduk yang serasi dengan daya dukung sumberdaya alam dan daya tampung lingkungan hidup di Kawasan Transmigrasi dalam rangka pembangunan perdesaan di daerah strategis	■ Jumlah keluarga yang difasilitasi perpindahannya ke Kawasan Transmigrasi	1.640 kel	8.850 kel ^{K)}	
			■ Jumlah keluarga penduduk yang tertata terintegrasi dalam Kawasan Transmigrasi	5.141 kel	26.771 kel ^{K)}	
			■ Data administrasi kependudukan masyarakat di Kawasan Transmigrasi	1.640 kel	8.850 kel ^{K)}	
			■ Jumlah bantuan perbekalan yang diberikan kepada calon transmigran	1.640 kel	8.850 kel ^{K)}	
			■ Jumlah fasilitasi pelatihan calon transmigran	52 Aktn	291 Aktn ^{K)}	
TOTAL ALOKASI KEMENAKERTRANS 2010-2014						18.829,2

K : Angka kumulatif 5 tahun (2010-2014)

**RENCANA TINDAK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH 2010-2014
PER KEMENTERIAN/LEMBAGA**

KEMENTERIAN/LEMBAGA: KEMENTERIAN SOSIAL

No	PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
I.	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Sosial	Peningkatan kecepatan dan ketepatan pelayanan manajemen yang efisien, efektif dan akuntabel.	Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran, dokumen kepegawaian dan administrasi tata laksana, dokumen keuangan, dan dokumen perundangan yang tepat waktu dan tepat guna	85	100	2.981,3
			Persentase peningkatan efektivitas dan efisiensi pelayanan umum, humas dan penyuluhan sosial	85	100	
II.	Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Pembangunan Kesejahteraan Sosial	Menurunnya penyimpangan dalam pelaksanaan program dan kegiatan.	Persentase temuan penyimpangan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang ditindaklanjuti	50	100	111,0
III.	Program Pemberdayaan Sosial	Meningkatnya fungsi sosial PMKS penerima manfaat melalui pemberdayaan dan pemenuhan kebutuhan dasar.	Persentase PMKS penerima manfaat yang mampu berperan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial melalui pelaksanaan pemberdayaan sosial	50	100	4.547,6
1.	Penanggulangan Kemiskinan	Tersalurkannya bantuan pemberdayaan masyarakat bagi fakir miskin dalam bentuk KUBE dan stimulan UEP.	Tersedianya akses kesempatan kerja dan berusaha, pelayanan kesehatan dasar dan pendidikan dasar melalui KUBE (kelompok)	12.793	80.028 ^{ki)}	2.701,2
			Tersedianya akses perumahan dan permukiman melalui Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (unit)	6.150	38.420 ^{ki)}	
2.	Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT)	Terpenuhinya kebutuhan dasar, aksesibilitas dan pelayanan sosial dasar bagi warga KAT	Tersedianya permukiman dan infrastruktur (unit)	2.300	3.720	738,2
			Pemberian jaminan hidup (KK)	4.270	7.010	

KEMENTERIAN/LEMBAGA: KEMENTERIAN SOSIAL

No	PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
IV.	Program Rehabilitasi Sosial	Meningkatnya fungsi sosial penyanggah masalah kesejahteraan sosial (PMKS) penerima manfaat melalui pelaksanaan pelayanan, perlindungan dan rehabilitasi sosial.	Persentase PMKS penerima manfaat yang mampu melaksanakan peranan dan fungsi sosial melalui pelaksanaan pelayanan, perlindungan dan rehabilitasi sosial	50	100	4.054,3
1.	Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial Anak	Terlaksananya pelayanan, perlindungan dan rehabilitasi sosial bagi anak dan balita telantar, anak jalanan, anak berhadapan dengan hukum, dan anak yang membutuhkan perlindungan khusus.	Jumlah anak dan balita telantar, anak jalanan, anak cacat, anak berhadapan dengan hukum, dan anak yang membutuhkan perlindungan khusus yang berhasil dilayani, dilindungi dan direhabilitasi baik di dalam maupun di luar panti (jiwa)	159.500	263.000	1.717,1
2.	Pelayanan Sosial Lanjut Usia	Terlaksananya pelayanan, perlindungan dan rehabilitasi sosial bagi lanjut usia telantar.	Jumlah lanjut usia telantar yang berhasil dilayani, dilindungi dan direhabilitasi baik di dalam maupun di luar panti (jiwa)	22.040	51.420	635,1
3.	Rehabilitasi dan Perlindungan Penyandang Cacat	Terlaksananya pelayanan, perlindungan dan rehabilitasi sosial bagi penyandang cacat.	Jumlah penyandang cacat yang berhasil dilayani, dilindungi dan direhabilitasi baik di dalam maupun di luar panti (jiwa)	34.900	75.640	1.293,7
V.	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Meningkatnya fungsi sosial PMKS penerima manfaat melalui pelaksanaan pelayanan, perlindungan dan jaminan sosial.	Persentase PMKS penerima manfaat yang mampu melaksanakan peranan dan fungsi sosial melalui pelaksanaan pelayanan, perlindungan dan jaminan sosial	50	100	13.490,8
1.	Bantuan Sosial Korban Bencana Alam	Terpenuhinya kebutuhan darurat dan pelayanan sosial bagi korban bencana alam.	Jumlah korban bencana alam yang berhasil dibantu dan dilayani (jiwa)	40.000	247.900 ^{K)}	2.340,2
2.	Bantuan Sosial Korban Bencana Sosial	Terpenuhinya kebutuhan darurat dan pelayanan sosial bagi korban bencana sosial.	Jumlah korban bencana sosial yang berhasil dibantu dan dilayani (jiwa)	43.000	266.900 ^{K)}	945,1
3.	Bantuan Tunai Bersyarat	Terlaksananya pemberian Bantuan Tunai Bersyarat bagi RTSM (PKH);	Jumlah RTSM yang mendapatkan Bantuan Tunai Bersyarat PKH (RTSM)	816.000	1.170.000	8.985,0
VI.	Program Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial	Peningkatan jumlah pekerja sosial dan tenaga kerja kesejahteraan sosial yang kompeten.	Persentase pekerja sosial dan tenaga kerja kesejahteraan sosial yang kompeten/ terlatih secara profesional	50	100	423,3
		Peningkatan pemanfaatan data, informasi, hasil kajian, hasil penelitian sebagai dasar penyusunan kebijakan dan program.	Persentase pemanfaatan data, informasi, hasil kajian, hasil penelitian sebagai dasar penyusunan kebijakan dan program	50	100	
TOTAL ALOKASI KEMENTERIAN SOSIAL 2010-2014						25.608,2

K : Angka kumulatif 5 tahun (2010-2014)

**RENCANA TINDAK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH 2010-2014
PER KEMENTERIAN/LEMBAGA**

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KEHUTANAN

No.	PROGRAM/PRIORITAS	SASARAN(Hasil Outcomes/Output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
1.	Peningkatan Pemanfaatan Hutan Produksi	Peningkatan investasi usaha pemanfaatan hutan produksi dan industri primer hasil hutan, serta peningkatan produksidan diversifikasi hasil hutan.	Areal hutan produksi tertata dalam unit-unit pengelolaan berupa KPHP dan usaha pemanfaatan (IUPHHK-HA/HT/HHBK/RE/Jasling) Produksi dan diversifikasi usaha pemanfaatan pada hutan alam produksi meningkat (sebesar 5 % terdiri dari hasil hutan kayu/HHBK/Jasling) Kinerja usaha pemanfaatan hutan tanaman dan intesitas pemanfaatan hutan produksi meningkat (luas tanaman bertambah 3 juta Ha) Penatausahaan hasil hutan dan iuran kehutanan berjalan tertib sesuai ketentuan (PNBP meningkat 25%) Ekspor hasil hutan meningkat (50% produk bersertifikat legalitas kayu)			1.587,9
a.	Peningkatan Pengelolaan Hutan Tanaman	Peningkatan produksi hutan tanaman	Penambahan areal ijin usaha pemanfaatan hutan tanaman (HTI/HTR) seluas 3 juta ha Penambahan areal tanaman pada hutan tanaman (HTI/HTR) seluas 2,65 juta ha. Sertifikasi Pengelolaan Hutan Produksi Lestari pada 50 unit manajemen hutan tanaman	450.000 ha 450.000 ha 5 unit	3.000.000 ha 2.650.000 ha 50 unit	249,5
b.	Peningkatan Pengelolaan Hutan Alam Produksi	Peningkatan produksi dan diversifikasi hutan alam	Produksi hasil hutan kayu/bukan kayu/jasa lingkungan sebesar 5 % Unit IUPHHK bersertifikat PHPL meningkat 50 % 50% produksi penebangan bersertifikat Legalitas Kayu Pengelolaan LOA oleh IUPHHK-HA/RE seluas 2,5 juta ha	1% 10% 10% 300.000 ha	5% 50% 50% 2.500.000 ha	275,7

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KEHUTANAN

No.	PROGRAM/PRIORITAS	SASARAN(Hasil Outcomes/Output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
c.	Peningkatan perencanaan pengelolaan hutan produksi	areal hutan produksi tertata baik dalam kesatuan pengelolaan hutan produksi (KPHP) maupun unit-unit usaha pemanfaatan hutan produksi	Terbentuknya KPHP pada seluruh kawasan hutan produksi	20%	100%	100,5
			Tersedianya areal calon/usulan pemanfaatan hutan produksi dalam bentuk unit-unit usaha pada 26 provinsi.	20%	100%	
d.	Peningkatan tertib peredaran hasil hutan dan iuran hasil hutan	Penatausahaan hasil hutan dan iuran kehutanan berjalan tertib sesuai ketentuan	PNBP dari investasi pemanfaatan hutan produksi meningkat sebesar 10%	2%	10%	325,5
			Implementasi SIM PUHH secara online di seluruh unit management IUPHHK dan IPHHK	20%	100%	
e.	Peningkatan usaha industri primer kehutanan	Peningkatan ekspor industri hasil hutan	Pemenuhan bahan baku dari hutan tanaman dan limbah meningkat 75%	15%	75%	121,7
			Produk industri hasil hutan yang bersertifikat legalitas kayu meningkat 50%	10%	50%	
			Efisiensi penggunaan bahan baku industri meningkat sebesar 10% (rata-rata 2% per tahun)	2%	10%	
2.	Perencanaan Makro Bidang Kehutanan dan Pemantapan Kawasan Hutan	Terjaminnya kepastian kawasan hutan sehingga dapat berfungsi secara optimal	Data dan informasi geospasial dasar tematik kehutanan terkini tingkat nasional sebanyak 5 judul Ijin pinjam pakai kawasan hutan dengan kompensasi PNBP paling tinggi 300 unit Rencana makro kehutanan tentang perlindungan dan konservasi sumberdaya alam, pemanfaat, rehabilitasi hutan dan lahan dan penataan ruang sebanyak 4 judul Tata batas kawasan hutan sepanjang 25.000 Km, terdiri dari batas luar dan batas fungsi kawasan hutan Penunjukan kawasan hutan provinsi terselesaikan 100% Keputusan Menteri Kehutanan tentang penetapan wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) di 28 propinsi			1.798,4
a.	Penguikuan Kawasan Hutan	Tata batas kawasan hutan serta terkendalinya perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan	Tata batas kawasan hutan sepanjang 25.000 km, terdiri dari batas luar dan batas fungsi kawasan hutan	3.400 km	25.000 km	393,4
			Keputusan penunjukan kawasan hutan propinsi selesai (100%)	20%	100%	
			Penetapan kelompok hutan yang telah selesai tata batas temu gelang sebanyak 75%	15%	75%	
			Rekomendasi tentang perubahan fungsi kawasan hutan terselesaikannya sebanyak 75%	15%	75%	
			Penanganan berupa penerbitan Surat keputusan tentang pelepasan kawasan hutan terselesaikan sebanyak 75%	15%	75%	

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KEHUTANAN

No.	PROGRAM/PRIORITAS	SASARAN(Hasil Outcomes/Output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
b.	Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)	Terwujudnya pengelolaan kawasan hutan dalam unit-unit pengelolaan, baik kawasan hutan konservasi, hutan produksi maupun hutan lindung	Penetapan wilayah kesatuan pengelolaan hutan produksi (KPHP) di 28 provinsi	4 Prov	28 Prov	189,0
			Penetapan wilayah kesatuan pengelolaan hutan konservasi (KPHK) di seluruh Indonesia	4 Prov	28 Prov	
			Penetapan wilayah kesatuan pengelolaan hutan lindung (KPHL) di 28 provinsi	4 Prov	28 Prov	
			Peraturan perundang-undangan penyelenggaraan kesatuan pengelolaan hutan (KPH) sebanyak 4 judul	2 Judul	4 Judul	
			Peta areal kerja dan peta pencadangan (IUPHHK-HT dan HA, HKm, HTR) selesai 90%.	15%	90%	
c.	Penyusunan rencana makro kawasan hutan	Perencanaan kawasan hutan secara optimal yang meliputi rencana makro kawasan hutan, penataan ruang, statistik dan pengemhangan jaringan komunikasi data kehutanan	Rencana makro kehutanan tentang perlindungan dan konservasi SDA, pemanfaatan, rehabilitasi hutan dan lahan, dan penataan ruang sebanyak 4 judul	1 judul	4 judul	298,5
			Persetujuan substansi teknis kehutanan dalam revisi RTRWP di seluruh Indonesia	50%	100%	
			Bahan kebijakan perencanaan ruang, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang kawasan hutan sebanyak 3 judul dan data strategis kehutanan sebanyak 5 judul.	2 judul	8 judul	
d.	Inventarisasi dan pemantauan sumberdaya hutan	Data dan informasi sumber daya hutan yang meliputi :hasil inventarisasi, pemantauan, pemetaan dan pengelolaan jaringan data spasial	Data dan informasi geospasial dasar tematik kehutanan terkini tingkat nasional sebanyak 5 judul	1 judul	5 judul	378,0
			Data dan informasi potensi kayu di kawasan hutan tingkat nasional sebanyak 5 judul	1 judul	5 judul	
			Data dan informasi pendugaan carbon kawasan hutan tingkat nasional sebanyak 5 judul	1 judul	5 judul	
			Basis data spasial sumberdaya hutan yang terintegrasi sebanyak 5 kali update	1 kali	5 kali	

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KEHUTANAN

No.	PROGRAM/PRIORITAS	SASARAN(Hasil Outcomes/Output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
e.	Pengendalian penggunaan kawasan hutan untuk pembangunan di luar kegiatan kehutanan	terlaksananya penggunaan kawasan hutan sesuai dengan persyaratan teknis dan ketentuan yang berlaku	<p>Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan dengan kompensasi penerimaan bukan pajak (PNBP) paling tinggi 80% dari pemohon</p> <p>Wajib bayar tertib membayar PNBP Penggunaan Kawasan Hutan minimal 80%</p> <p>Data dan informasi penggunaan kawasan hutan tersedia di 32 provinsi</p> <p>Peraturan perundangan untuk pengendalian dan penertiban penggunaan kawasan hutan tanpa ijin sebanyak 1 judul</p>	16%	80%	53,5
				15%	80%	
				6 Prov	32 Prov	
				1 Judul	1 Judul	
3.	Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Perlindungan Hutan	Biodiversity dan ekosistemnya berperan signifikan sebagai penyangga ketahanan ekologis dan penggerak ekonomi riil serta pengungkit martabat bangsa dalam pergaulan global	<p>Taman nasional dan kawasan konservasi lainnya yang potensi keanekaragaman hayatinya tinggi, terdapat spesies langka dan flagship, atau mempunyai fungsi pelindung hulu sungai, dan atau memiliki potensi wisata alam signifikan, sudah dapat mandiri dalam arti mampu menghasilkan uang untuk membiayai program pengembangan konservasi</p> <p>Populasi keanekaragaman hayati dan spesies yang terancam punah meningkat 3% dari kondisi tahun 2008 sesuai kondisi biologis dan kesediaan habitat</p> <p>Kasus baru tindak pidana kehutanan (illegal logging, perambahan, perdagangan tumbuhan dan satwa liar(TSL) ilegal, penambangan ilegal dan kebakaran hutan) penanganannya terselaikan minimal 75%</p> <p>Hotspot (titik api) di pulau Kalimantan, pulau Sumatera, dan pulau Sulawesi berkurang 20% setiap tahun</p> <p>Meningkatnya destinasi wisata alam yang dapat berperan dalam pasar wisata nasional</p>			6.715,2
a.	Pengembangan Kawasan Konservasi dan Ekosistem Esensial	Meningkatnya pengelolaan dan pendayagunaan 50 unit taman nasional dan 477 unit kawasan konservasi lainnya (CA, SM, TB, dan HL) dan ekosistem esensial.	<p>Konflik dan tekanan terhadap kawasan taman nasional dan kawasan konservasi lainnya (CA, SM, TB, dan HL) menurun sebanyak 5%</p> <p>Pengelolaan ekosistem esensial sebagai penyangga kehidupan meningkat 10%.</p> <p>Penanganan perambahan kawasan hutan pada 12 provinsi prioritas (Sumut, Riau, Jambi, Sumsel, Sumbar, Lampung, Kaltim, Kalteng, Kalsel, Kalbar, Sultra, dan Sulteng)</p> <p>Restorasi ekosistem kawasan konservasi, 1 paket per tahun</p>	1%	5%	1.381,3
				2%	10%	
				2 Prov	12 Prov	
				1 paket	5 paket ^{K)}	

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KEHUTANAN

No.	PROGRAM/PRIORITAS	SASARAN(Hasil Outcomes/Output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
b.	Penyidikan dan Perlindungan Hutan	Meningkatnya pengamanan kawasan hutan, hasil hutan dan jaminan terhadap hak negara atas hutan	Kasus baru tindak pidana kehutanan (illegal logging, perambahan, perdagangan TSL, illegal, penambangan illegal dan kebakaran) penanganannya terselesaikan minimal sebanyak 75%	15%	75%	836,6
			Tunggakan perkara (illegal logging, perambahan, perdagangan TSL, illegal, penambangan illegal dan kebakaran) terselesaikan sebanyak 25% per tahun	25%	76,30%	
			Kasus hukum perambahan kawasan konservasi terselesaikannya sebanyak 20%	4%	20%	
c.	Pengembangan konservasi spesies dan genetik	Meningkatnya kualitas konservasi keanekaragaman hayati dan produk tumbuhan dan satwa liar	Populasi keanekaragaman hayati dan spesies terancam punah meningkat sebesar 3% dari kondisi tahun 2008 sesuai kondisi biologis dan kesediaan habitat	0%	3%	462,9
			Penangkaran dan pemanfaatan jenis keanekaragaman hayati secara lestari meningkat 5%	1%	5%	
			Kerjasama internasional dan konvensi di bidang konservasi keanekaragaman hayati sebanyak 1 paket per tahun	1 paket	1 paket	
			Terselenggaranya skema DNS Kehutanan, 1 paket per tahun	1 paket	5 paket ^{ki)}	
d.	Pengendalian kebakaran hutan	Meningkatkan sistem pencegahan pemadaman, penanggulangan, dampak kebakaran hutan dan lahan	Hotspot di Pulau Kalimantan, Pulau Sumatera, dan Pulau Sulawesi berkurang 20% setiap tahun.	20%	67,20%	1.275,0
			Luas kawasan hutan yang terbakar ditekan hingga 50% dibandingkan kondisi tahun 2008	10%	50%	
			Peningkatan kapasitas aparat pemerintah dan masyarakat dalam penanggulangan bahaya kebakaran hutan di 30 DAOPS	6 DAOPS	30 DAOPS	
e.	Pengembangan pemanfaatan jasa lingkungan dan wisata alam	Meningkatnya pemanfaatan jasa lingkungan dan wisata alam	Pengusahaan pariwisata alam meningkat sebesar 60% dibandingkan tahun 2008, dan ijin usaha pemanfaatan jasa lingkungan air baru sebanyak 25 unit.	5 Unit	25 Unit	464,7
			PNBP dibidang pengusahaan pariwisata alam meningkat 100% dibandingkan tahun 2008.	20%	100%	
			Peningkatan pendapatan masyarakat di sekitar kawasan konservasi tertentu meningkat menjadi minimal Rp 800.000,00 per bulan per kepala keluarga (atau sebesar 30%) melalui upaya-upaya pemberdayaan masyarakat.	6%	30%	

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KEHUTANAN

No.	PROGRAM/PRIORITAS	SASARAN(Hasil Outcomes/Output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
4.	Peningkatan Fungsi dan Daya Dukung DAS Berbasis Pemberdayaan Masyarakat	Berkurangnya lahan kritis pada DAS Prioritas sehingga dapat mengurangi resiko bencana alam, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam usaha komoditas kehutanan	<p>Fasilitas dan pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan kritis termasuk hutan mangrove, gambut dan rawa pada DAS Prioritas seluas 2,5 juta ha.</p> <p>Fasilitas penetapan areal kerja pengelolaan hutan kemasyarakatan (HKm) seluas 2 juta ha.</p> <p>Fasilitas pembangunan hutan rakyat untuk bahan baku industri pertukangan seluas 250.000 ha.</p> <p>Fasilitas penetapan areal sumber benih di seluruh bioregion seluas 6.000 ha, dan pengelolaan areal sumber benih yang telah ada seluas 4.500 ha.</p> <p>Rencana pengelolaan DAS terpadu pada 108 unit DAS prioritas.</p> <p>Fasilitas penetapan areal kerja hutan desa seluas 500.000 ha.</p>			16.131,0
a.	Penyelenggaraan Rehabilitasi Hutan dan Lahan, dan Reklamasi Hutan di DAS Prioritas	berkurangnya lahan kritis melalui rehabilitasi dan reklamasi hutan	<p>Fasilitas dan pelaksanaan rehabilitasi hutan pada DAS prioritas seluas 800.000 ha.</p> <p>Fasilitas rehabilitasi lahan kritis pada DAS prioritas seluas 500.000 ha.</p> <p>Fasilitas pengembangan hutan kota seluas 5000 ha.</p> <p>Fasilitas rehabilitasi hutan mangrove, gambut dan rawa seluas 295.000 ha</p>	160.000 Ha	800.000 Ha	8.222,5
b.	Pengembangan Perhutanan Sosial	meningkatnya pengelolaan hutan melalui pemberdayaan masyarakat	<p>Fasilitas penetapan areal kerja pengelolaan hutan kemasyarakatan (HKm) seluas 2 juta ha</p> <p>Fasilitas 500 kelompok/unit ijin usaha pengelolaan HKm</p> <p>Fasilitas 50 unit kemitraan usaha HKm</p> <p>Fasilitas dukungan kelembagaan ketahanan pangan di 32 provinsi</p> <p>Fasilitas pembangunan hutan rakyat Kemitraan untuk bahan baku kayu industri pertukangan seluas 250.000 Ha</p> <p>Fasilitas pembentukan dan berfungsinya sentra HHBK Unggulan di 30 kabupaten</p> <p>Areal kerja hutan desa seluas 500.000 ha</p>	400.000 Ha	2.000.000 Ha	6.239,2
c.	Pengembangan perbenihan tanaman hutan	ketersediaan materi genetik, sumber benih, dan benih berkualitas yang memadai	Areal sumber benih seluas 4.500 ha terkelola secara baik	4.500 Ha	4.500 Ha	109,5

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KEHUTANAN

No.	PROGRAM/PRIORITAS	SASARAN(Hasil Outcomes/Output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
			Fasilitasi pembangunan areal sumber benih seluas 6.000 ha	1.200 Ha	6.000 Ha	
			Pengembangan Seed for People 1 paket per tahun	1 paket	5 paket ^{K)}	
			Pengembangan sentra bibit 1 paket/tahun	1 paket	5 paket ^{K)}	
d.	Pembinaan penyelenggaraan pengelolaan DAS	Terselenggaranya pengelolaan DAS secara terpadu pada DAS prioritas	Rencana pengelolaan DAS terpadu di 108 DAS prioritas	22 DAS	108 DAS	721,9
			Terbangunnya base line data pengelolaan DAS di 36 BPDAS	7 BPDAS	36 BPDAS	
			Tersedianya data dan peta lahan kritis di 36 BPDAS	7 BPDAS	36 BPDAS	
5.	Penelitian dan Pengembangan Kementerian Kehutanan	Minimal 60% hasil penelitian dan pengembangan kehutanan dapat dimanfaatkan dalam pengambilan kebijakan, pengelolaan teknis kehutanan dan pengayaan ilmu pengetahuan, termasuk pengembangan kebijakan dan teknis yang berkaitan dengan isu-isu perubahan iklim	Iptek dasar dan terapan yang dimanfaatkan oleh pengguna untuk bidang hutan alam, biodiversitas dan pengelolaan DAS sebanyak 7 judul			1.109,2
			Iptek dasar dan terapan yang dimanfaatkan oleh pengguna bidang hutan tanaman dan HHBK sebanyak 6 judul			
			Iptek dasar dan terapan yang dimanfaatkan oleh pengguna bidang pengolahan hasil hutan sebanyak 5 judul			
			Iptek dasar dan terapan yang dimanfaatkan oleh pengguna bidang lansekap hutan, perubahan iklim dan kebijakan kehutanan sebanyak 7 judul			
a.	Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Kehutanan dan Perubahan Iklim.	Ketersediaan dan termanfaatkan iptek dasar dan terapan bidang lansekap hutan, adaptasi dan mitigas perubahan iklim, dan kebijakan kehutanan	Iptek dasar dan terapan yang dihasilkan pada bidang lansekap hutan, perubahan iklim dan kebijakan kehutanan sebanyak 7 judul	20%	100%	113,4
			Iptek dasar dan terapan yang dimanfaatkan oleh pengguna pada bidang lansekap hutan, perubahan iklim dan kebijakan kehutanan sebanyak 7 judul.	20%	100%	

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KEHUTANAN

No.	PROGRAM/PRIORITAS	SASARAN(Hasil Outcomes/Output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
b.	Penelitian dan Pengembangan Konservasi dan Rehabilitasi Sumberdaya Alam.	tersedia dan termanfaatkannya Iptek dasar dan terapan konservasi dan rehabilitasi sumberdaya alam	Iptek dasar dan terapan yang dihasilkan bidang hutan alam, biodiversitas dan pengelolaan DAS, 7 judul.	20%	100%	120,2
			Iptek dasar dan terapan yang dimanfaatkan oleh pengguna bidang hutan alam, biodiversitas dan pengelolaan DAS sebanyak 7 judul.	20%	100%	
c.	Penelitian dan Pengembangan Hasil Hutan	ketersediaan dan termanfaatkannya IPTEK dasar dan terapan bidang pengolahan hasil hutan	Iptek dasar dan terapan yang dihasilkan pada bidang pengolahan hasil hutan sebanyak 5 judul	20%	100%	109,7
			Iptek dasar dan terapan yang dimanfaatkan oleh pengguna bidang pengolahan hasil hutan sebanyak 5 judul	20%	100%	
d.	Penelitian dan Pengembangan Peningkatan Produktivitas Hutan	ketersediaan dan pemanfaatan IPTEK dasar dan terapan hutan tanaman	Iptek dasar dan terapan bidang hutan tanaman dan hasil hutan bukan kayu (HHBK) sebanyak 6 judul	20%	100%	158,2
			Iptek dasar dan terapan yang dimanfaatkan oleh pengguna bidang hutan tanaman dan HHBK sebanyak 6 judul	20%	100%	
6.	Dukungan Managemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Jenderal Kementerian Kehutanan					2.976,7
f.	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kementerian Kehutanan dan SDM Kehutanan Lainnya	Meningkatnya kualitas dan kapasitas SDM Depratemen Kehutanan serta SDM kehutanan lainnya (Pemda dan Masyarakat)	Penyelenggaraan SMK kehutanan 1.440 siswa	285 siswa	1.440 siswa	761,2
			Diklat teknis dan administrasi 15.000 orang peserta	3.000 orang	15.000 orang	
			Karyasiswa lulus studi S2/S3 sebanyak 325 orang siswa	65 siswa	325 siswa	
			Sertifikasi ISO 9001 : 2007 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Kehutanan sebanyak 5 unit	0 unit	5 unit	
g.	Penyuluhan kehutanan	Peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan kehutanan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat	Pembentukan 500 kelompok masyarakat produktif mandiri	100 Klpk	500 Klpk	407,2
			Peningkatan kapasitas 4.500 orang penyuluh kehutanan	900 Org	4.500 Org	
			Kampanye Indonesia Menanam (KMI) pada 33 provinsi	33 Prov	33 Prov	
			Kemitraan/jejaring kerja penyuluhan kehutanan sebanyak 5 paket	1 Paket	5 Paket	
7	Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Kehutanan					215,5
TOTAL ALOKASI KEMENTERIAN KEHUTANAN 2010 – 2014						30.533,9

K : Angka kumulatif 5 tahun (2010-2014)

**RENCANA TINDAK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH 2010-2014
PER KEMENTERIAN/LEMBAGA**

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
1	Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap	Meningkatnya produktivitas perikanan tangkap dan kesejahteraan nelayan	Jumlah Produksi perikanan tangkap (ton)	5.384.740	5.500.000	8.144,8
			Jumlah pendapatan nelayan: - pendapatan nelayan pemilik/bulan (Rp) - pendapatan nelayan buruh/bulan (Rp)	1.769.220 601.730	2.441.550 1.200.000	
a.	Pengelolaan Sumber Daya Ikan (SDI)	Meningkatnya Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) yang terjamin ketersediaan sumber daya ikan dengan data dan pengelolaan pemanfaatan yang terintegrasi, akuntabel dan tepat waktu.	• Jumlah lokasi pemantauan dan evaluasi perlindungan dan pengkayaan SDI	6 prov	33 prov	354,6
			• Jumlah ekosistem PUD yang teridentifikasi (8 prov per tahun)	8 prov	40 prov ^{K)}	
			• Jumlah perairan teritorial dan kepulauan yang teridentifikasi sumber dayanya	1 WPP	11 WPP 33 prov	
			• Jumlah ZEEI yang teridentifikasi sumber dayanya	11 prov	27 prov ^{K)}	
b.	Pembinaan dan Pengembangan Kapal Perikanan, Alat Penangkap Ikan, dan Pengawakan Kapal Perikanan	Terwujudnya kecukupan kapal perikanan Indonesia (yang laik laut, laik tangkap dan laik simpan), alat penangkap ikan (yang sesuai SNI) dan pengawakan yang memenuhi standar di setiap WPP	Jumlah dan jenis kapal penangkap ikan yang memenuhi standar laik laut, laik tangkap dan laik simpan	500 unit	700 unit	384,0

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
			Jumlah alat penangkap ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang memenuhi standar	600 unit	2.929 unit	
			Jumlah awak kapal perikanan yang memenuhi standar kompetensi	60 orang	240 orang	
c.	Pengembangan Pembangunan dan Pengelolaan Pelabuhan Perikanan	Meningkatnya pembangunan dan pencapaian standar pelayanan prima di pelabuhan perikanan dengan fasilitas penunjang produksi, pengolahan, pemasaran dan kesyahbandaran yang sesuai standar.	Jumlah pelabuhan perikanan dengan fokus pembangunan di lingkaran luar dan daerah perbatasan yang potensial	968 unit	988 unit	6.084,8
			Jumlah penyiapan pembangunan pelabuhan perikanan sesuai dengan rencana induk	35 Lokasi	190 Lokasi ^{KJ}	
			Jumlah pelabuhan perikanan yang mempunyai Wilayah Kerja Operasional Pelabuhan Perikanan (WKOPP)	10	50	
d.	Pelayanan Usaha Perikanan Tangkap yang Efisien, Tertib, dan Berkelanjutan	Meningkatnya pelayanan prima dan ketertiban usaha perikanan tangkap sesuai ketersediaan SDI di setiap WPP secara akuntabel dan tepat waktu.	Jumlah keabsahan dan kelengkapan dokumen usaha perikanan tangkap	8.000 SIUP, SIPI/SIKPI	12.000 SIUP, SIPI/SIKPI	200,9
			Jumlah pelaku usaha perikanan tangkap yang memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan yang berlaku	2.500	4.500	
			Jumlah kapal dan jenis alat penangkap ikan yang diperbolehkan sesuai dengan ketersediaan sumber daya ikan di setiap WPP	4.900 SIPI	8.900 SIPI	

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
e.	Pengembangan Usaha Penangkapan Ikan dan Pemberdayaan Nelayan Skala Kecil	Jumlah kawasan potensi perikanan tangkap yang menjadi kawasan Minapolitan dengan usaha yang bankable serta realisasi investasi usaha perikanan tangkap.	Jumlah kawasan minapolitan potensi perikanan tangkap yang memiliki Kelompok Usaha Bersama (KUB) yang Mandiri.	1 PP 5 PPI	1 PP 5 PPI	454,1
			Jumlah Kelompok Usaha Bersama (KUB) yang Mandiri.	999 KUB	1.800 KUB	
			Jumlah usaha perikanan tangkap yang memenuhi kelayakan usaha dan <i>bankable</i>	999 KUB	1.800 KUB	
2	Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	Meningkatnya produksi, produktivitas dan mutu hasil perikanan budidaya.	Volume produksi perikanan budidaya (ton)	5.376.200	16.891.000	4.331,4
			Jumlah benih dengan mutu terjamin.	Benih ikan 36 miliar ekor	Benih ikan 256 miliar ekor ^{KJ}	
				Bibit rumput laut 267.280 ton	Bibit Rumput laut 2,8 juta ton ^{KJ}	
			Jumlah kawasan perikanan budidaya yang memiliki prasarana dan sarana sesuai kebutuhan.	76 kab/kota	238 kab/kota	
				- Payau : 45 kawasan	- Payau : 145 kawasan	
				- Tawar : 76 kawasan	- Tawar : 238 kawasan	
- Laut : 56 kawasan	- Laut : 158 kawasan					
a	Pengembangan Sistem Produksi Pembudidayaan Ikan	Meningkatnya produksi perikanan budidaya dengan mutu terjamin dan data akurat.	Jumlah produksi perikanan budidaya air tawar.	1,4 juta ton	4,6 juta ton	620,8
			Jumlah produksi perikanan budidaya air payau.	1.137.920 ton	2.022.220 ton	
			Jumlah produksi perikanan budidaya laut	2.846.475 ton	10.288.175 ton	
			Jumlah usaha perikanan budidaya yang bersertifikat dan memenuhi standar.	1.000 unit	7.000 unit	

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
b.	Pengembangan Sistem Perbenihan Ikan	Terpenuhinya kebutuhan benih untuk produksi dan pasar dengan mutu terjamin dan data akurat.	Jumlah produksi induk unggul.	6,5 juta ekor induk	52,2 juta ekor induk ^{KJ}	534,3
				267.280 ton	2,7 juta ton ^{KJ}	
			Jumlah unit perbenihan yang bersertifikat dan benih yang memenuhi standar	51 unit	404 unit ^{KJ}	
c.	Pengembangan Sistem Kesehatan Ikan dan Lingkungan Pembudidayaan Ikan	Kawasan perikanan budidaya yang sehat serta produk perikanan yang aman dikonsumsi.	Jumlah laboratorium uji yang memenuhi standar teknis.	Lab. Kualitas air : 25 unit	Lab. Kualitas air : 48 unit	678,3
				Lab. HPI (hama penyakit ikan) : 20 unit	Lab. HPI : 35 unit	
				Lab. Residu : 9 unit	Lab. Residu : 25unit	
			Jumlah kawasan perikanan budidaya yang sehat serta persentasi jenis biota perairan yang dikonservasi.	350 kab	450 kab	
d.	Pengembangan Sistem Usaha Pembudidayaan Ikan	Kawasan potensi perikanan budidaya menjadi kawasan Minapolitan dengan usaha yang <i>bankable</i> .	Jumlah kelompok usaha perikanan budidaya yang memenuhi standar kelembagaan dan jumlah tenaga kerja yang memiliki kompetensi.	157 kelompok	3.388 kelompok	466,4
				394 orang	2.364 orang	
			Jumlah usaha perikanan budidaya yang memperoleh SNI serta jumlah lembaga sertifikasi yang terakreditasi	936 unit usaha	4.948 unit usaha	
				19 Lab uji; 3 LSSM (lembaga sertifikat sistem mutu)	43 Lab uji	
					15 LSSM	
e.	Pengembangan Sistem Prasarana dan Sarana Pembudidayaan Ikan	Kawasan perikanan budidaya yang memiliki prasarana dan sarana sesuai kebutuhan.	Luas lahan budidaya sesuai target produksi disertai data potensi yang akurat.	1.115.666 Ha, 70 potensi kawasan	1.365.416 Ha, 150 potensi kawasan	667,5

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)	
				2010	2014		
f.	Pengawasan dan Penerapan Teknologi Terapan Adaptif Perikanan Budidaya	Sentra produksi perikanan budidaya yang memiliki komoditas unggulan dan menerapkan teknologi inovatif.	Persentase unit usaha yang mendapatkan pelayanan sertifikasi sesuai standar dengan informasi yang akurat.	100%	100%	1.109,5	
3	Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan	Meningkatnya produk olahan bernilai tambah, jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan, investasi, distribusi dan akses pasar hasil perikanan	Jumlah pangsa pasar ekspor, penambahan jumlah ragam produk ekspor, nilai ekspor atau volume ekspor, serta jumlah impor terkendali sesuai standard dan kebutuhan.	3,2% pangsa ekspor	3,2% pangsa ekspor	1.585,2	
				6 ragam produk ekspor	11 ragam produk ekspor		
				US\$ 2,9 Milyar nilai ekspor	US\$ 5 miliar nilai ekspor		
				1,38 juta ton volume ekspor	2,43 juta ton volume ekspor		
				0,28 juta ton volume impor	0,49 juta ton volume impor		
a.	Fasilitasi Pengembangan Industri Pengolahan Hasil Perikanan	Meningkatnya volume produk olahan hasil perikanan dengan kemasan dan mutu terjamin	Jumlah sarana prasarana pengolahan sesuai target produksi pengolahan	58 lokasi	84 lokasi	245,5	
				Jumlah sentra pengolahan	5 lokasi		25 lokasi ^{K)}
				Volume produksi dari UKM	2,3 juta ton		2,8 juta ton
b.	Fasilitasi Pengembangan Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	Meningkatnya unit penanganan, pengolahan dan distribusi hasil perikanan yang memperoleh sertifikasi sesuai standar nasional dan internasional	Jumlah laboratorium sertifikasi yang memiliki sarana prasarana sesuai standar mutu laboratorium	17 lab	40 lab ^{K)}	233,8	
				Jumlah kegiatan penanganan, pengolahan, distribusi dan pengujian mutu hasil perikanan yang memperoleh SNI dan persyaratan internasional	179 SNI		1.095 SNI ^{K)}
				Jumlah laboratorium uji mutu hasil perikanan yang memperoleh akreditasi dari KAN	17 lab		40 lab ^{K)}
				Jumlah Unit Pengolahan Ikan (UPI) dan hasil perikanan yang bersertifikasi	424 UPI		1.768 UPI ^{K)}

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
c.	Fasilitasi Penguatan dan Pengembangan Pemasaran Dalam Negeri Hasil Perikanan	Meningkatnya jumlah desa yang memiliki pasar yang mampu memfasilitasi penjualan hasil perikanan dan tingkat konsumsi ikan	Jumlah pelelangan ikan dan pasar ikan yang berfungsi sesuai standar	18 TPI	271 TPI ^{K)}	590,9
				7.061 pasar	35 ribu pasar ^{K)}	
			Jumlah lokasi pelaksanaan kegiatan Gemarikan (Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan)	33 provinsi	33 provinsi	
d.	Fasilitasi Penguatan dan Pengembangan Pemasaran Luar Negeri Hasil Perikanan	Meningkatnya jumlah pangsa pasar ekspor perikanan	Jumlah penambahan negara tujuan ekspor	3	5	94,1
			Jumlah UKM binaan yang berpotensi ekspor	50	50	
e.	Fasilitasi Pembinaan dan Pengembangan Sistem Usaha dan Investasi Perikanan	Meningkatnya jumlah nilai investasi (PMA dan PMDN) bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan dan jumlah unit pengolahan ikan yang memenuhi standar ketenagakerjaan	Jumlah unit usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan yang memenuhi standar ketenagakerjaan sesuai SKKNI	430 UPI	3.860 UPI ^{K)}	244,9
4	Program Pengelolaan Sumber Daya Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Meningkatnya penataan dan pemanfaatan sumber daya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil secara berkelanjutan dan mensejahterakan masyarakat	Jumlah kawasan pesisir yang tahan terhadap ancaman kerusakan, memiliki infrastruktur dasar serta jumlah ragam dan volume produk kelautan yang dikembangkan	10 kawasan, 2 kapal, 50 ribu ton	140 kawasan ^{K)} 12 kapal 500 ribu ton	3.856,0
			Jumlah kawasan laut, pesisir dan pulau-pulau kecil yang memiliki peta potensi dan arahan pemanfaatan yang terintegrasi, akuntabel dan terkini serta terkendali pemanfaatannya	23 kawasan	145 kawasan ^{K)}	
			Jumlah kelompok usaha mikro yang mandiri serta jumlah usaha mikro di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil	800.000 usaha	2.000.000 usaha	
				120 unit	300 unit	

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
a.	Pengelolaan dan Pengembangan Konservasi Kawasan dan Jenis	Terkelolanya 20% kawasan ekosistem terumbu karang, lamun, mangrove dan 15 jenis biota perairan yang terancam punah	kawasan konservasi laut dan kawasan konservasi perairan tawar dan payau yang dikelola secara berkelanjutan seluas 4,5 juta ha	900 ribu ha	4,5 juta ha ^{KJ}	745,4
			Jumlah kawasan konservasi dan jenis biota perairan dilindungi yang diidentifikasi dan dipetakan secara akurat.	9 Kawasan dan 3 jenis	9 Kawasan dan 3 jenis	
b.	Penataan Ruang dan Perencanaan Pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil	Tersedianya 145 rencana zonasi nasional/ provinsi/ kabupaten/ kota, 50 masterplan minapolitan, 30 masterplan kluster pulau-pulau kecil bernilai ekonomi tinggi serta 12 master plan kawasan sentra produksi kelautan	Jumlah kawasan laut dan pesisir yang memiliki peta potensi dan arahan pemanfaatan yang terintegrasi, akuntabel dan terkini	6 kawasan	50 kawasan ^{KJ}	481,1
			Jumlah kawasan pulau-pulau kecil yang memiliki peta potensi dan arahan pemanfaatan yang terintegrasi, akuntabel dan terkini	23 kawasan	145 kawasan ^{KJ}	
c.	Pendayagunaan Pesisir dan Lautan	Terkelolanya 50 Kawasan minapolitan yang tahan terhadap ancaman kerusakan dan mempunyai infrastruktur dasar, serta 3 produk kelautan	Jumlah luasan kawasan pesisir rusak yang pulih kembali.	60 ha	5.000 ha ^{KJ}	404,5
			Jumlah ragam dan volume produk kelautan yang dikembangkan pada kawasan pesisir dan lautan.			
			- BMKT	2 kapal	12 kapal ^{KJ}	
			- Garam	50 ribu ton	500 ribu ton ^{KJ}	
		- Deep sea water	200 ribu liter	7,2 juta liter ^{KJ}		

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
d.	Pendayagunaan Pulau-Pulau Kecil	Terwujudnya 200 pulau kecil yang memiliki infrastruktur memadai, ekosistem baik, siap terhadap bencana, dan 25 di antaranya terinvestasi	Jumlah pulau kecil yang diidentifikasi dan dipetakan potensinya secara akurat termasuk pulau-pulau kecil terluar	20 pulau	205 pulau ^{KJ}	578,5
			Jumlah pulau kecil yang memiliki infrastuktur memadai secara terintegrasi termasuk pulau-pulau kecil terluar	20 pulau	205 pulau ^{KJ}	
e.	Pelayanan Usaha dan Pemberdayaan Masyarakat	Meningkatnya keberdayaan dan kemandirian 2 juta usaha skala mikro di seluruh kawasan minapolitan pesisir, beroperasinya sarana usaha mikro di 300 kabupaten/kota pesisir.	Jumlah kelompok usaha mikro di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang <i>bankable</i> .			1.300,6
			- Pengembangan sarana usaha Mikro LKM	100 unit	100 unit	
			- Dana Pemberdayaan Masyarakat Desa/PNPM MK	120 kab/kota	120 kab/kota	
			- Tenaga pendamping	480 orang	480 orang	
		- Kelompok Usaha Mikro	800.000 usaha	800.000 usaha		
5	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Indonesia bebas <i>Illegal, Unreported & Unregulated (IUU) Fishing</i> serta kegiatan yang merusak sumber daya kelautan dan perikanan	Persentase wilayah pengelolaan perikanan bebas IUU fishing	62%	100%	3.049,6
			Persentase pelaku tindak pidana kelautan dan perikanan yang divonis secara akuntabel dan tepat waktu serta persentase penurunan tindak pidana kelautan dan perikanan	55%	100%	
a	Peningkatan Operasional Pengawasan Sumber Daya Perikanan	Meningkatnya usaha perikanan yang sesuai ketentuan	Jumlah <i>usaha</i> penangkapan ikan di wilayah bagian barat yang sesuai ketentuan	280 kapal	2.680 kapal	170,1
			Jumlah <i>usaha</i> penangkapan ikan di wilayah bagian timur yang sesuai ketentuan	180 kapal	1.712 kapal	

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
b	Peningkatan Operasional Pengawasan Sumber Daya Kelautan	Meningkatnya wilayah perairan Indonesia yang bebas kegiatan <i>illegal</i> dan merusak	Jumlah wilayah perairan yang bebas kegiatan perusakan ekosistem perairan	4 wilayah	27 wilayah	87,0
			Jumlah wilayah perairan yang bebas kegiatan pencemaran	7 wilayah perairan	40 wilayah perairan	
c	Peningkatan Operasional dan Pemeliharaan Kapal Pengawas	Meningkatnya wilayah pengelolaan perikanan bebas <i>IUU fishing</i>	Jumlah wilayah pengelolaan perikanan bagian barat bebas <i>IUU Fishing</i>	3 WPP	5 WPP	1.617,3
			Jumlah wilayah pengelolaan perikanan bagian timur bebas <i>IUU Fishing</i>	6 WPP	6 WPP	
d	Pengembangan Sarana dan Prasarana Pengawasan dan Pemantuan Kapal Perikanan	Terpenuhinya sarana dan prasarana pengawasan dengan rancang bangun dan sistem pemantauan yang terintegrasi dan tepat sasaran	Jumlah pemenuhan sarana pengawasan yang memadai secara terintegrasi, akuntabel dan tepat waktu			536,9
			Kapal Pengawas	0	55 ^{K)}	
			Speedboat	15	137 ^{K)}	
			Stasiun Radar Satelit	0	0 ^{K)}	
			Transmitter VMS	0	1 ^{K)}	
			Pemenuhan prasarana pengawasan yang memadai secara terintegrasi, akuntabel dan tepat waktu			
			Kantor dan Bangunan Pengawas	5	30 ^{K)}	
			Dermaga	2	27 ^{K)}	
Pos Pengawas	15	70 ^{K)}				
e	Penyelesaian tindak pidana kelautan dan perikanan	Meningkatnya pelaku tindak pidana kelautan dan perikanan yang divonis secara akuntabel dan tepat waktu serta persentase penurunan tindak pidana kelautan dan perikanan	Jumlah Kapal yang diperiksa	4000	40.164 ^{K)}	93,5

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
6	Program Penelitian dan Pengembangan IPTEK Kelautan dan Perikanan	Termanfaatkannya hasil riset dan inovasi IPTEK kelautan dan perikanan	Jumlah inovasi IPTEK yang : memperoleh pengakuan (HKI, SNI, dan Penghargaan), direkomendasikan dan mempunyai model penerapan	IPTEK yang memperoleh pengakuan (HKI, SNI, penghargaan) 3 buah	IPTEK yang memperoleh pengakuan (HKI, SNI, penghargaan)13 buah ^{KJ}	2.721,7
			Hasil riset yang menjadi rekomendasi basis kebijakan dan di publikasikan	5	36 ^{KJ}	
a.	Penelitian dan Pengembangan IPTEK Perikanan Tangkap	Wilayah perairan Indonesia yang teridentifikasi potensi produksi, karakteristik, kebutuhan konservasi SDInya serta jumlah inovasi teknologi dan rekomendasi pengelolaannya.	Jumlah rekomendasi pengelolaan	6 buah	23 buah ^{KJ}	413,0
b.	Penelitian dan Pengembangan IPTEK Perikanan Budidaya	HKI (Hak Kekayaan Intelektual), rekomendasi, inovasi teknologi dan produk biologi yang meningkatkan efisiensi produksi, ragam, kualitas dan keamanan komoditas unggulan.	Jumlah rekomendasi yang meningkatkan efisiensi produksi, ragam varietas baru/unggul, kualitas dan keamanan komoditas unggulan	5	25 ^{KJ}	434,4
c.	Penelitian dan Pengembangan IPTEK Kelautan	Rekomendasi dan inovasi teknologi perlindungan pantai, energy terbarukan, pengawasan, eksplorasi, eksploitasi, instrumentasi kelautan, maritim, mitigasi/adaptasi bencana dan perubahan iklim yang meningkatkan efisiensi pengelolaan sumber daya kelautan	Jumlah rekomendasi dan inovasi teknologi perlindungan, pengawasan, eksplorasi, eksploitasi, instrumentasi kelautan, maritim, mitigasi/adaptasi bencana dan perubahan iklim yang meningkatkan efisiensi pengelolaan sumber daya kelautan secara berkelanjutan	2	10 ^{KJ}	242,8
				9	45 ^{KJ}	

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
d.	Penelitian dan Pengembangan IPTEK Kewilayahan, Dinamika dan Sumber Daya Nonhayati Pesisir dan Laut	Wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil yang teridentifikasi potensi, karakteristik, kebutuhan konservasi SDNHL dan fenomena alamnya serta jumlah rekomendasi pengelolaan dan model pemanfaatannya.	Jumlah rekomendasi pengelolaan dan model pemanfaatannya, serta Jumlah paket data terkait dengan fenomena alam dan sumber daya non hayati di wilayah pesisir ,laut, serta pulau-pulau kecil	Rekomendasi dan/atau model pemanfaatan: 3	Rekomendasi dan/atau model pemanfaatan: 15 ^{KJ}	260,7
				1paket data terkait fenomena alam laut, 5 paket data terkait SDNH, pesisir, dan laut	5 paket data terkait fenomena alam laut, 25 paket data terkait SDNH, pesisir, dan laut ^{KJ}	
e.	Penelitian dan Pengembangan IPTEK Pengolahan Produk dan Bioteknologi Kelautan dan Perikanan	HKI, rekomendasi serta inovasi teknologi dan bioteknologi yang meningkatkan efisiensi pengolahan secara optimal, ragam, nilai tambah, kualitas dan keamanan produk unggulan/ prospektif.	Jumlah HKI (Hak Kekayaan Intelektual), rekomendasi serta inovasi teknologi dan bioteknologi yang meningkatkan efisiensi pengolahan secara optimal, ragam, nilai tambah, kualitas dan keamanan produk unggulan/ prospektif.	Paket Teknologi: 3	Paket Teknologi: 16, ^{KJ} HKI :2	241,9
f.	Penelitian dan Perekayasaan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan	Rekomendasi pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan berkelanjutan dan model pengembangan usaha dan pemasaran berbasis minapolitan.	Jumlah rekomendasi pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan berkelanjutan dan model pengembangan usaha dan pemasaran berbasis minapolitan	Rekomendasi: 4 bh	Rekomendasi: 20 bh ^{KJ}	206,2
				Model pengembangan: 4 bh	Model pengembangan: 20bh ^{KJ}	
7	Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan	SDM KP memiliki kompetensi sesuai kebutuhan	Lulusan pendidikan memiliki kompetensi sesuai kebutuhan dan dapat diserap untuk kebutuhan tenaga kerja di dunia usaha dan dunia industri	980 orang	5.600 orang ^{KJ}	2.348,2

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
a.	Pelatihan Kelautan dan Perikanan	Terselenggaranya pelatihan yang sesuai standar serta persentase lulusan yang meningkat kinerjanya sesuai standar kompetensi dan kebutuhan pasar	Jumlah lulusan pelatihan yang sesuai standar serta jumlah lulusan yang meningkat kinerjanya sesuai standar kompetensi dan kebutuhan pasar	6.160 masyarakat 1.103 aparatur	15000 masyarakat 2200 aparatur	347,6
b.	Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	Meningkatnya kawasan potensi perikanan yang memiliki kelompok pelaku utama yang mandiri dalam mengembangkan usaha perikanan	Jumlah kelompok potensi perikanan yang disuluh	300 Kelompok di 50 kawasan	700 kelompok di 50 kawasan	447,1
c.	Pendidikan Kelautan dan Perikanan	Terpenuhinya tenaga terdidik kompeten sesuai standar dan kebutuhan serta prioritas nasional	Jumlah lulusan pendidikan yang kompeten sesuai standard dan kebutuhan serta prioritas nasional	1.400 orang	7000 orang ^{KJ}	963,4
8	Pengawasan dan peningkatan Akuntabilitas Aparatur DKP	Pengelolaan administrasi, keuangan, BMN, SPIP dan Tindak Lanjut Temuan satker lingkup DKP yang akuntabel dan tepat waktu	Persentase satker lingkup DKP yang melaksanakan pengelolaan administrasi, keuangan, BMN, SPIP dan Tindak Lanjut Temuan yang akuntabel dan tepat waktu	30%	70%	278,7
9	Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya DKP	Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya lingkup DKP				4.105,3
a	Pembinaan dan Koordinasi Penyiapan Produk Hukum dan Penataan Organisasi DKP		Persentase pemenuhan peraturan perundang-undangan serta efektivitas dan kemutakhiran hukum laut, perjanjian, perizinan, organisasi dan tata laksana sesuai kebutuhan nasional dan tantangan global, serat pelayanan bantuan hukum yang akuntabel	50%	90%	66,0

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
b	Pengembangan dan Pembinaan Perkarantinaan Ikan		Persentase media pembawa hama penyakit ikan impor, ekspor dan antar area yang bebas hama penyakit ikan karantina dengan laboratorium karantina yang sesuai standar OIE dan SNI	63,34%	83,4%	1.702,0
TOTAL ALOKASI KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN 2010-2014						30.420,8

K : Angka kumulatif 5 tahun (2010-2014)

**RENCANA TINDAK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH 2010-2014
PER KEMENTERIAN/LEMBAGA**

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

No.	PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil Outcomes/ Output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
I	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR					59.949,6
1	Pengelolaan dan Konservasi Waduk, Embung,	Meningkatnya ketersediaan dan terjaganya kelestarian air dengan kapasitas 12 miliar m ³	Jumlah waduk dan embung/situ yang dibangun sebanyak 12 waduk dan 158 embung/situ	1 waduk selesai dibangun; 5 waduk dalam pelaksanaan pembangunan; 20 embung/situ selesai dibangun	11 waduk selesai dibangun; 1 waduk dalam pelaksanaan pembangunan; 158 embung/situ selesai dibangun ^{K)}	15.625,5 6.481,3
			Jumlah waduk, embung/situ yang direhabilitasi sebanyak 29 waduk dan 298 embung/situ	2 waduk selesai di rehabilitasi, 9 waduk dalam pelaksanaan rehabilitasi dan 37 embung/situ selesai direhabilitasi	29 waduk selesai di rehabilitasi, dan 298 embung/situ selesai direhabilitasi ^{K)}	1.845,3
			Jumlah waduk/embung/situ yang dioperasikan dan dipelihara sebanyak 182 waduk/embung/situ	182 waduk/embung/situ	166 waduk/embung/situ	1.320,0
			Jumlah kawasan sumber air yang di konservasi sebanyak 15 kawasan	9 kawasan	15 kawasan ^{K)}	645,0
		Terkendalnya bahaya banjir, meningkat dan terjaganya ketersediaan air di Daerah Aliran Sungai Bengawan Solo	Jumlah waduk yang dibangun di DAS Bengawan Solo (7 waduk)	1 Waduk Bendo (Ponorogo)	1 Waduk Bendo (Ponorogo)	900,0
				1 Wadung Gondang (Sragen)	1 Wadung Gondang (sragen)	306,0
				Penyelesaian 1 Waduk Gonggang	1 Waduk Gonggang	20,0
				1 Waduk Kresek (Madiun)	1 Waduk Kresek (Madiun)	457,0

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

No.	PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil Outcomes/ Output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
				1 Waduk Kedung Bendo (Pacitan)	1 Waduk Kedung Bendo (Pacitan)	553,0
					1 Waduk Kendang (Blora)	107,0
				1 Waduk Pidekso (Wonogiri)	1 Waduk Pidekso (Wonogiri)	1.350,0
		Prasarana sumber daya air di DAS Bengawan Solo yang direhabilitasi	Penanganan Sedimen Waduk Wonogiri dan Konservasi DAS Keduang		Tertanganinya Sedimen Waduk Wonogiri dan Konservasi DAS Keduang	1.060,0
			Rehabilitasi 7 Waduk (Prijetan, Cengklik, Tlogo Ngebel, Banjar Anyar, Tlego Sarangan, Kedung Uling, Gonggang)		Rehabilitasi 7 Waduk (Prijetan, Cengklik, Tlogo Ngebel, Banjar Anyar, Tlego Sarangan, Kedung Uling, Gonggang)	106,0
			Rehabilitasi Embung / Waduk Lapangan		Terehabilitasi Embung / Waduk Lapangan	105,0
		terpeliharanya waduk di DAS Bengawan Solo	Operasi WS dan Pemeliharaan Infrastruktur SDA Bengawan Solo		Terlaksananya operasi WS dan Pemeliharaan Infrastruktur SDA Bengawan Solo	180,0
		terlaksananya konservasi di DAS Bengawan Solo			Terkonservasinya 2 Kali (Kali Tirtomoyo & Kali Asin)	130,0
					Terkonservasinya arboretum Sumber Daya Air Bengawan Solo	60,0

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

No.	PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil Outcomes/ Output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)	
				2010	2014		
2	Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	Meningkatnya dan terjaganya kualitas dan cakupan layanan pada 2,55 juta hektar daerah irigasi, 1,21 juta daerah rawa dan pemanfaatan air tanah untuk irigasi seluas 44,89 ribu hektar				22.509,0	
			Luas layanan jaringan irigasi yang ditingkatkan (129,38 ribu hektar)	115 ribu hektar	129,38 ribu hektar	K))	2.924,5
			Luas layanan jaringan irigasi yang direhabilitasi (1,34 juta hektar)	200 ribu hektar	1,34 juta hektar	K))	13.000,0
			Luas layanan jaringan irigasi yang dioperasikan dan dipelihara (2,315 juta hektar)	2,315 juta hektar	2,315 juta hektar		2.000,0
			Luas layanan jaringan rawa yang ditingkatkan (10 ribu hektar)	10 ribu hektar	10 ribu hektar		60,0
			Luas layanan jaringan rawa yang direhabilitasi (450 ribu hektar)	85 ribu hektar	450 ribu hektar	K))	1.700,0
			Luas layanan jaringan rawa yang dioperasikan dan dipelihara (1,2 juta hektar)	800 ribu hektar	1,2 juta hektar	K))	1.000,0
			Jumlah sumur air tanah yang dibangun (70 sumur air tanah)	70 sumur air tanah	70 sumur air tanah		77,0
			Jumlah sumur air tanaha yang direhabilitasi (1.875 sumur air tanah) untuk mengairi areal seluas 37.500 hektar	230 sumur air tanah	1.875 sumur air tanah	K))	615,8
			Jumlah sumur air tanah yang dioperasikan dan dipelihara (2.192 sumur air tanah) untuk mengairi areal seluas 43.840 hektar	425 sumur air tanah	2.192 sumur air tanah	K))	219,2
Luas layanan jaringan tata air tambak yang dibangun / ditingkatkan (seluas 1.000 hektar)	1.000 hektar	1.000 hektar		7,5			

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

No.	PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil Outcomes/ Output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
			Luas layanan jaringan tata air tambak yang direhabilitasi (seluas 175 ribu hektar)	4.000 hektar	175.000 hektar	525,0
			berkembangnya daerah irigasi dan drainase di DAS Bengawan Solo		Berkembangnya DI & Drainase Bengawan Jero / rawa Jero	380,0
3	Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku	Meningkatnya layanan prasarana air baku dengan kapasitas 43,4 m3/det dan terjaganya layanan air baku dengan kapasitas 44,8 m3/det	Kapasitas air baku yang ditingkatkan sebesar 43,4 m3/det	7,6 m3/det	43,4 m3/det	6.349,4
			Kapasitas prasarana air baku yang direhabilitasi sebesar 12,3 m3/det	2,5 m3/det	12,3 m3/det	700,0
			Kapasitas prasarana air baku yang terjaga sebesar total 44,8 m3/det	5,5 m3/det	44,8 m3/det	100,0
4	Pengendalian Banjir, Lahar Gunung Berapi dan Pengamanan Pantai	Terlindungnya kawasan seluas 48,66 ribu hektar dari bahaya banjir dan terlindungnya kawasan pantai sepanjang 80 km dari abrasi pantai serta terkendalinya 16 juta m3 lahar gunung berapi/sedimen	Panjang sarana/prasarana pengendali banjir yang dibangun (216 km)	168 km	216 km	15.465,6
			Panjang sarana/prasarana pengendali banjir yang direhabilitasi (386 km)	139 km	386 km	2.508,6
			Panjang sarana/prasarana pengendali banjir yang dioperasikan dan dipelihara (2.000 km) untuk mengamankan kawasan seluas 35,7 ribu hektar	700 km	2.000 km	3.745,0
			Jumlah sarana/prasarana pengendali lahar/sedimen yang dibangun (28 buah) untuk mengendalikan lahar/sedimen dengan volume 16 juta m3	28 buah	28 buah	927,5
						116,5

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

No.	PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil Outcomes/ Output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
			Jumlah sarana/prasarana pengendali lahar/sedimen yang direhabilitasi (85 unit) untuk mengendalikan lahar/sedimen dengan volume 6 juta m3	4 buah	85 buah	145,0
			Jumlah sarana/prasarana pengendali lahar/sedimen yang dioperasikan dan dipelihara (150 unit) untuk mengendalikan lahar/sedimen dengan volume 12 juta m3	10 buah	150 buah	75,0
			Panjang sarana/prasarana pengaman pantai yang dibangun (30 km)	30 km	30 km	200,0
			Panjang sarana/prasarana pengaman pantai yang direhabilitasi (50 km)	3 km	50 km	278,5
			Panjang sarana/prasarana pengaman pantai yang dipelihara (50 km)	30 km	50 km	50,0
		Diselesaikannya dan berfungsinya Banjir Kanal Timur untuk mengurangi daerah genangan akibat banjir di Wilayah Jakarta	Diselesaikannya pembangunan kanal timur paket 22 s/d 29	7 Paket	7 paket	613,7
			Diselesaikannya kegiatan supervisi konstruksi Banjir Kanal Timur	1 kegiatan	1 kegiatan	5,7
			Terbangunnya bangunan akhir / jetty di muara Banjir Kanal Timur		800 meter	196,1
			Terbangunnya jalan inspeksi		19 km	76,4
			Terbangunnya perkuatan tebing		17 km	59,3
			Diselesaikannya normalisasi Kali Blencong		1 km	79,5
			Terbangunnya inlet Cakung		1 buah	14,2
			Terbangunnya Saluran Gendong		7 km	17,8

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

No.	PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil Outcomes/ Output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
			Terbangunnya Utilitas (PGN Jaktim, PLN Jaktim, TPJ)		3 unit	20,2
			Terbangunnya Jembatan penyeberangan orang (BKT 226)		1 buah	5,1
			Terbangunnya Jembatan BKT 207		1 buah	5,1
			Terbangunnya drain inlet		2 buah	2,2
			Terbangunnya perkuatan bronjong		18.000 m ³	41,8
			Tebangunnya jalan oprit		2 buah	7,3
			Diselesaikanya pekerjaan galian dan timbunan hulu Kali Sunter		100 meter	0,9
			Diselesaikannya Pemasangan Grass Block		23,5 meter	28,2
		Terkendalinya bahaya banjir di Daerah Aliran Sungai Bengawan Solo	terbangunnya prasarana pengendali banjir	pompa banjir di 5 lokasi	pompa banjir di 5 lokasi	40,0
				kawasan retensi di 3 Sungai di Ponorogo	kawasan retensi di 3 Sungai di Ponorogo	50,0
				1 Bendung Gerak/Bojonegoro Barrage	1 Bendung Gerak/Bojonegoro Barrage	260,0
				Jabung Ring Dike	Jabung Ring Dike	460,0
				Remaining Works LSRIP-phase I	Remaining Works LSRIP-phase I	100,0
				1 Bendung Gerak Sembayat	1 Bendung Gerak Sembayat	650,0
				Tanggul Kota Ngawi	Tanggul Kota Ngawi	61,0
				Pengaturan kawasan rawan banjir Bojonegoro	Pengaturan kawasan rawan banjir Bojonegoro	40,0
				Flood Forecasting Warning System (FFWS) Bengawan Solo	Flood Forecasting Warning System (FFWS) Bengawan Solo	40,0

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

No.	PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil Outcomes/ Output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
					Tanggul Kiri Bengawan Solo Rengel-Centini	480,0
			terehabilitasinya prasarana pengendali banjir	pintu air Demangan	pintu air Demangan	130,0
				Normalisasi 3 Sungai (Kali Mungkung, Kali Gropol dan Kali Sawur)	Normalisasi Kali 3 sungai (Mungkung, Kali Gropol dan Kali Sawur)	170,0
					Perbaikan dan Pengaturan Kali Madiun (Kwadungan-Ngawi)	540,0
				Normalisasi Kali Lamong	Normalisasi Kali Lamong	1.100,0
				Perbaikan Sungai Bengawan Solo Hulu (Jurug-Sragen)	Perbaikan Sungai Bengawan Solo Hulu (Jurug-Sragen)	2.005,0
				Rehabilitasi Pasca Banjir Kali Madiun	Rehabilitasi Pasca Banjir Kali Madiun	120,0
II	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN					148.418,9
1	Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan dan Jembatan Nasional	Terjaganya kualitas jalan dan jembatan sepanjang 171.695 Km	Jumlah jalan yang dipreservasi sepanjang 171.695 Km	31.227,80 Km	171.695 Km ^{K)}	47.545,9
			Jumlah jembatan yang dipreservasi sepanjang 602.944,40 Meter	118.837,54 Meter	602.944,4 Meter ^{K)}	5.426,1
		Meningkatnya kapasitas dan kualitas jalan sepanjang 19.407,27 Km jalan nasional dan 26.957,83 meter jembatan	Jumlah jalan yang ditingkatkan kapasitasnya (pelebaran) sepanjang 19.370 Km	3.660,30 Km	19.370 Km ^{K)}	67.021,5
			Jumlah jalan lingkar/bypass yang dibangun sepanjang 36,65 Km	0,24 Km	36365 Km ^{K)}	534,5
			Jumlah jembatan yang bangun sepanjang 16.157,83 meter	3.170,42 Meter	16.157,83 Meter ^{K)}	4.000,9

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

No.	PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil Outcomes/ Output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
			Jumlah flyover/underpass yang dibangun sepanjang 10.800 meter	4.345,00 Meter	10.800 Meter ^{KD)}	2.437,0
			Jumlah jalan strategis di lintas Selatan Jawa, perbatasan, terpencil dan terluar yang dibangun sepanjang 1.377,94 Km	113,43 Km	1.377,94 Km ^{KD)}	7.403,9
2	Pembinaan Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan dan Fasilitas Jalan Bebas Hambatan dan Perkotaan	Meningkatnya kapasitas jalan tol sepanjang 120,35 Km	Jumlah jalan tol yang dibangun sepanjang 120,35Km	5,05 Km	29,40 Km ^{KD)}	8.815,0
3	Penyusunan kebijakan, program dan anggaran serta evaluasi pelaksanaan program	Meningkatnya kualitas kebijakan, program dan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan jalan 100% per tahun	Jumlah kebijakan, program dan evaluasi penyelenggaraan jalan	1	1	1.308,5
4	Penyiapan standar pedoman, penyusunan desain supervisi dan keselamatan jalan serta pengelolaan peralatan bahan jalan/jembatan	Meningkatnya kualitas standar dan pedoman teknis penyelenggaraan jalan 90% per tahun	Jumlah dokumen NSPK dan SPM yang disusun	0,9	0,9	785,1
5	Pembinaan dan monitoring evaluasi pelaksanaan jalan dan jembatan wilayah barat	Terlaksananya pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan jalan dan jembatan di wilayah barat 100% per tahun	Jumlah kegiatan monitoring, evaluasi dan pembinaan pelaksanaan teknis jalan daerah wilayah barat	1	1	1.046,8
6	Pembinaan dan monitoring evaluasi pelaksanaan jalan dan jembatan wilayah timur	Terlaksananya pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan jalan dan jembatan di wilayah timur 100% per tahun	Jumlah kegiatan monitoring, evaluasi dan pembinaan pelaksanaan teknis jalan daerah wilayah timur	1	1	1.046,8
7	Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya Direktorat Jenderal Bina Marga	Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan jalan 100% per tahun	Jumlah dukungan manajemen dan teknis penyelenggaraan jalan	1	1	523,4
8	Penyelenggaraan jalan tol	Terlaksananya pengaturan, pengusahaan dan pengawasan penyelenggaraan jalan tol 100% per tahun	Jumlah panjang jalan tol yang dibangun oleh swasta	1	1	523,4

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

No.	PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil Outcomes/ Output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
III	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN					50.000,0
		Meningkatnya kualitas perencanaan dan pengendalian pemanfaatan ruang bagi terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan (termasuk adaptasi dan mitigasi perubahan iklim)	Meningkatnya jumlah kabupaten kota yang menerapkan NSPK bidang Permukiman dalam rangka perencanaan dan pengendalian pemanfaatan ruang bagi terwujudnya pembangunan permukiman yang berkelanjutan			
		Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman dan cakupan pelayanan (dasar) bidang Pekerjaan Umum untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat	Meningkatnya jumlah kawasan yang mendapat akses pelayanan infrastruktur bidang permukiman			
I	Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan dan Penyelenggaraan dalam Pengembangan	5 paket, 205 kab/kota	Jumlah penyusunan NSPK bidang pengembangan permukiman	2 paket, 80 kab/kota	5 paket, 205 kab/kota ^{K)}	83,0
		207 kab/kota	Jumlah Strategi Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan (SPPK)	50	207 kab/kota ^{K)}	292,0
		207 kab/kota	Jumlah Rencana Pengembangan Kawasan Permukiman (RPKP)	30	207 kab/kota ^{K)}	290,0

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

No.	PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil Outcomes/ Output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
		207 kawasan	Jumlah rencana tindak penanganan kawasan kumuh perkotaan di kab/kota	95	207 kawasan ^{K)}	272,0
		60 paket	Jumlah peningkatan kemampuan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pengembangan permukiman	0	60 paket ^{K)}	26,0
		207 kawasan	Jumlah kawasan kumuh di perkotaan yang tertangani	95	207 kawasan ^{K)}	1.358,0
		26.760 unit	Jumlah satuan unit hunian Rumah Susun yang terbangun dan infrastruktur pendukungnya	3960	26.760 unit ^{K)}	3.330,0
		240 kawasan	Jumlah kawasan perumahan bagi MBR	104	240 kawasan ^{K)}	837,0
		15 kawasan	Jumlah kawasan permukiman rawan bencana	3	15 kawasan ^{K)}	65,0
		205 kawasan	Jumlah kawasan perdesaan potensial / agropolitan yang tertangani	55	205 kawasan ^{K)}	780,0
		185 kawasan	Jumlah kawasan yang dilayani oleh infrastruktur pendukung kegiatan ekonomi dan sosial	50	185 kawasan ^{K)}	1.285,0
		8.803 desa	Jumlah peningkatan lingkungan hunian untuk masyarakat yang tinggal di pulau kecil, desa tertinggal dan terpencil	1500	8.803 desa ^{K)}	2.800,0

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

No.	PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil Outcomes/ Output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
		102 kawasan	Jumlah kawasan yang mengalami peningkatan kualitas lingkungan di kawasan perbatasan dan pulau kecil terluar	39	102 kawasan ^{K)}	259,0
2	Pengaturan, Pembinaan, Dan Pengawasan Dalam Penataan Bangunan Dan Lingkungan Termasuk Pengelolaan Gedung Dan Rumah Negara, serta Penyelenggaraan Pembangunan Bangunan Gedung dan Penataan Kawasan/Lingkungan Permukiman	37 NSPK	Jumlah NSPK bidang Penataan Bangunan dan Lingkungan	7	37 NSPK ^{K)}	19,0
		NSPK di 226 kab/kota, RTBL di 193 kab/kota, RISPK di 125 kab/kota dan 155 kawasan, RTH di 213 kab/kota, Rencana Tindak Pengembangan Kawasan Permukiman Tradisional dan Bersejarah	Jumlah pendampingan penyusunan NSPK bidang penataan bangunan dan lingkungan oleh Pemda	NSPK di 32 kab/kota, RTBL di 32 kab/kota, RISPK di 41 kab/kota dan 32 kawasan, RTH di 33 kab/kota, Rencana Tindak Pengembangan Kawasan Permukiman Tradisional dan Bersejarah di 33 kawasan	NSPK di 226 kab/kota, RTBL di 193 kab/kota, RISPK di 125 kab/kota dan 155 kawasan, RTH di 213 kab/kota, Rencana Tindak Pengembangan Kawasan Permukiman Tradisional dan Bersejarah ^{K)}	496,0
		33 propinsi	Jumlah propinsi yang mendapatkan pembinaan peningkatan kualitas penyelenggaraan bangunan gedung	33	33 propinsi	241,0
		65 kab/kota	Jumlah kab/kota yang mendapat pemeliharaan gedung negara yang bersejarah	5	65 kab/kota ^{K)}	240,0
		111 kab/kota	Jumlah kab/kota yang mendapat manfaat pengembangan sarana dan prasarana pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran	7	111 kab/kota ^{K)}	329,0
		128 kab/kota	Jumlah kab/kota yang mendapatkan peningkatan bangunan gedung yang memenuhi persyaratan kelengkapan aksesibilitas pada bangunan gedung	10	128 kab/kota ^{K)}	43,0

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

No.	PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil Outcomes/ Output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
		152 kawasan	Jumlah kawasan yang meningkat kualitasnya	32	152 kawasan ^{K)}	1.137,0
		207 kawasan	Jumlah kawasan yang mengalami peningkatan kualitas ruang terbuka hijau pada lingkungan permukiman	39	207 kawasan ^{K)}	562,0
		160 kawasan	Jumlah kawasan yang mengalami peningkatan kualitas lingkungan permukiman tradisional dan bersejarah	65	160 kawasan ^{K)}	400,0
		33 Propinsi	Jumlah propinsi yang mendapatkan PIP2B	22	33 Propinsi ^{K)}	160,0
		21.984 kel/des	Jumlah kel/des yang mendapatkan pendampingan pemberdayaan masyarakat PNPM-P2KP	9556	20.293 Kel/Desa ^{K)}	5.943,0
3	Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, Pengembangan Sumber Pembiayaan Dan Pola Investasi, serta Pengelolaan Pengembangan Infrastruktur Sanitasi Dan Persampahan	75 buah NSPK	Jumlah NSPK untuk pengelolaan air limbah, drainase, dan persampahan yang tersusun	3 NSPK air limbah; 2 NSPK drainase; 3 NSPK persampahan	25 NSPK air limbah, 20 NSPK drainase, dan 30 NSPK persampahan ^{K)}	67,7
		426 Bantek, Bintek, dan pendampingan SSK	Jumlah Bantek, Bintek, dan pendampingan (SSK) pengelolaan air limbah, drainase, dan persampahan	34 Bantek, Bintek, dan pendampingan (SSK) air limbah; 8 Bantek, Bintek, dan pendampingan (SSK) drainase; 22 Bantek, Bintek, dan pendampingan (SSK) persampahan	226 Bantek, Bintek, dan pendampingan (SSK) air limbah; 50 Bantek, Bintek, dan pendampingan (SSK) drainase; dan 150 Bantek, Bintek, dan pendampingan (SSK) persampahan ^{K)}	644,7

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

No.	PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil Outcomes/ Output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
		65 paket diklat	Jumlah penyelenggaraan pelatihan (Diklat) teknis pengelolaan sanitasi lingkungan dan persampahan	6 paket diklat pengelolaan air limbah; 2 paket diklat pengelolaan drainase; 2 paket diklat pengelolaan persampahan	35 paket diklat pengelolaan air limbah; 15 paket diklat pengelolaan drainase; dan 15 paket diklat pengelolaan persampahan ^{K)}	129,5
		426 kegiatan monev	Jumlah monev kinerja pengembangan air limbah, drainase, dan persampahan	34 kegiatan monev air limbah; 7 kegiatan monev drainase; 21 kegiatan monev persampahan	226 kegiatan monev air limbah; 50 kegiatan monev drainase; 150 kegiatan monev persampahan ^{K)}	54,9
		15 kegiatan fasilitasi pengembangan sumber pembiayaan dan pengembangan pola investasi persampahan	Jumlah fasilitasi pengembangan sumber pembiayaan dan pola investasi bidang persampahan melalui kerjasama pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat	2 kegiatan fasilitasi	15 kegiatan fasilitasi pengembangan sumber pembiayaan dan pengembangan pola investasi persampahan ^{K)}	15,0
		peningkatan pelayanan air limbah di 221 kab/kota	Pembangunan prasarana dan sarana air limbah dengan sistem off-site dan on-site	11 kab/kota sistem off-site; 30 kab/kota sistem on-site	11 kab/kota dengan sistem off-site dan 210 kab/kota dengan sistem on-site ^{K)}	4.458,0
		penanganan drainase di 50 kab/kota (4.600 Ha)	Pembangunan drainase perkotaan	26 kab/kota	50 kab/kota ^{K)}	3.204,0
		peningkatan TPA di 210 kab/kota , sarana pengumpul sampah sebanyak 250 unit , persampahan terpadu 3R di 250 lokasi	Peningkatan/pembangunan TPA, prasarana pengumpulan sampah dan persampahan terpadu 3R	55 kab/kota peningkatan TPA dan 50 lokasi persampahan terpadu 3R	Peningkatan TPA di 210 kab/kota ^{K)} , 250 unit sarana pengumpul sampah, dan 250 lokasi persampahan terpadu 3R	5.500,0

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

No.	PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil Outcomes/ Output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
4	Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, Pengembangan Sumber Pembiayaan dan Pola Investasi, serta Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	peningkatan pelayanan air minum di 4.650 desa, 577 kawasan MBR perkotaan, 820 IKK, 100 kawasan khusus (pemekaran, pulau terluar, perbatasan, terpencil, dan KAPET), dan 53 kawasan pelabuhan perikanan	Jumlah desa, kawasan MBR perkotaan, IKK, dan kawasan khusus (pemekaran, pulau terluar, perbatasan, terpencil, dan KAPET) yang terfasilitasi	1.472 desa, 74 kawasan MBR perkotaan, 144 IKK, 18 kawasan khusus, dan 13 kawasan pelabuhan perikanan	4.650 desa, 577 kawasan MBR perkotaan, 820 IKK, 100 kawasan khusus (pemekaran, pulau terluar, perbatasan, terpencil, dan KAPET), dan 53 kawasan pelabuhan perikanan ^{K)}	10.884,0
		pembinaan bagi 185 PDAM dan 225 non-PDAM	Jumlah PDAM dan non-PDAM yang memperoleh pembinaan	pembinaan 35 PDAM dan 30 non-PDAM	Pembinaan bagi 185 PDAM dan 225 non-PDAM ^{K)}	996,0
		Rencana Induk SPAM di 200 kab/kota	Jumlah Rencana Induk SPAM yang telah ditetapkan	30 kab/kota	200 kab/kota ^{K)}	209,0
		diklat bagi penyelenggara air minum di 100 kab/kota dan monev di 299 kab/kota	Jumlah penyelenggaraan pelatihan (Diklat) teknis dan jumlah monev pengembangan air minum	18 kab/kota, 50 kab/kota	Diklat bagi penyelenggara air minum di 100 kab/kota dan monev di 299 kab/kota ^{K)}	83,0
		22 NSPK air minum dan NSPK dalam Perda di 100 kab/kota	Jumlah NSPK tersusun dan jumlah kab/kota yang menyelenggarakan pengembangan SPAM sesuai NSPK	4 NSPK	22 NSPK air minum dan NSPK dalam Perda di 100 kab/kota ^{K)}	104,0
		fasilitasi pinjaman bank bagi 107 PDAM, prastudi KPS di 23 PDAM, dan 9 laporan studi alternatif pembiayaan pengembangan SPAM	Jumlah laporan pra studi kelayakan KPS dan studi alternatif pembiayaan	20 PDAM terfasilitasi pinjaman bank, 3 PDAM prastudi KPS	107 PDAM terfasilitasi pinjaman bank, prastudi KPS di 23 PDAM, dan 9 laporan studi alternatif pembiayaan pengembangan SPAM ^{K)}	71,0
		kampanye hemat air di 32 provinsi dan percontohan reuse dan daur ulang air limbah di 8 lokasi	Jumlah aktivitas reuse/daur ulang air, jumlah provinsi yang melakukan kampanye	32 provinsi	32 provinsi dan 8 lokasi ^{K)}	74,0

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

No.	PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil Outcomes/ Output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
5	Pelayanan Manajemen Bidang Permukiman	Pelaksanaan administrasi penggajian dan perkantoran untuk 9.500 pegawai	Jumlah pegawai dan paket pembinaan	1.900 pegawai dan 45 paket	9.500 pegawai dan 233 paket ^{K)}	1.167,0
		31 paket untuk persampahan dan drainase, 65 unit untuk air minum dan air limbah, 33 paket cadangan mendesak bidang Perkim	Penyediaan prasarana dan sarana air minum, air limbah, persampahan dan drainase pada lokasi pasca bencana/konflik sosial	5 paket, 13 unit dan 5 paket cadangan	31 paket untuk persampahan dan drainase, 65 unit untuk air minum dan air limbah, 33 paket cadangan mendesak bidang Perkim ^{K)}	650,0
6	Penyusunan Kebijakan, Program dan Anggaran, Kerjasama Luar Negeri, Data Informasi serta Evaluasi Kinerja Infrastruktur Bidang Permukiman	185 paket	Jumlah paket penyusunan kebijakan, strategi, program dan anggaran, kerjasama luar negeri dan pola investasi, evaluasi, data dan informasi	37 paket	185 paket ^{K)}	441,2
IV	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG					2.545,1
1	Pengembangan Kapasitas dan Pelembagaan Penyelenggaraan Penataan Ruang	Meningkatnya SDM Penataan ruang yang berkualitas	Jumlah kegiatan pelatihan bidang penataan ruang yang dilaksanakan	2 kegiatan	29 kegiatan ^{K)}	44,0
2	Perencanaan, Pemanfaatan, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Nasional termasuk Melakukan Koordinasi dan Fasilitasi Proses Penetapan Dokumen-dokumen yang dihasilkan	Keserasian dan keselarasan program pembangunan yaitu program dalam RTRWN, RTR Pulau, RTR KSN, RTR PKN, PKSN	Jumlah rencana tata ruang yang telah disinkronkan program pembangunannya	33 provinsi	33 provinsi	720,2

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

No.	PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil Outcomes/ Output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
3	Penyiapan dan Penetapan Materi Peraturan Perundangan-undangan dan NSPK Bidang	<p>Tersusunnya PP Sesuai Amanat UU 26/2007, yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • PP tentang Penyelenggaraan Pembinaan Penataan Ruang • PP tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (termasuk di dalamnya adalah PP tentang Kriteria dan Tata Cara Peninjauan Kembali RTRW • PP tentang Zonasi Sistem Nasional • PP tentang Prosedur Perolehan Izin Pemanfaatan Ruang Dan Tata Cara Penggantian Yang Layak • PP tentang Insentif dan Disinsentif • PP tentang Pengendalian Pemanfaatan Ruang • PP tentang Kriteria Kawasan Perkotaan • PP tentang Penataan Kawasan Perkotaan • PP tentang Penataan Kawasan Agropolitan • PP tentang Penataan Ruang Kawasan Perdesaan • PP tentang Sanksi Administratif 	Meningkatnya (Presentase) Penyelesaian PP Sesuai Amanat UU 26/2007	8 NSPK	60 NSPK ^{*)}	96,0

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

No.	PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil Outcomes/ Output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
4	Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Nasional Termasuk Melakukan Koordinasi dan Fasilitas Proses Penetapan Dokumen-dokumen yang Dihasilkan	Tersusunnya Perpres Sesuai Amanat UU 26/2007: • Perpres RTR Pulau • Perpres RTR KSN	Meningkatnya Penyelesaian Perpres sesuai Amanat UU 26/2007	4 RTR Pulau dan 4 Perpres KSN	7 RTR Pulau dan 69 Perpres KSN ^{*)}	204,5
5	Fasilitasi Penyusunan Substansi Raperda RTRW dan Rencana Rincinya	Tersusunnya Perda Sesuai Amanat UU 26/2007: • Perda mengenai RTRW Provinsi • Perda mengenai RTRW Kabupaten	Meningkatnya Penyelesaian Perda Provinsi dan Kabupaten Amanat UU 26/2007	4 kegiatan	11 kegiatan ^{*)}	11,4
6	Peningkatan kualitas hasil penyelenggaraan penataan ruang	Terlaksananya bantek dan bintek penataan ruang di pusat dan daerah	Jumlah kegiatan stock taking tata ruang provinsi	0	18 kegiatan ^{*)}	15,0
			Jumlah kabupaten yang mendapatkan bantek peningkatan pelaksanaan penataan ruang kabupaten pemenang PKPD	3 kab	15 kab ^{*)}	18,8
			Jumlah kabupaten yang mendapatkan bimbingan teknis penataan ruang wilayah kabupaten	44 kab	220 kab ^{*)}	103,2
			Jumlah kabupaten yang mendapatkan bimbingan teknis pengembangan wilayah/kawasan perdesaan dan agropolitan	1 kawasan	28 kawasan ^{*)}	24,3
			Jumlah kegiatan bimbingan teknis pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi	6 kegiatan	22 kegiatan ^{*)}	21,9

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

No.	PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil Outcomes/ Output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
			Jumlah kawasan andalan/koridor yang mendapatkan arahan pengembangan wilayah lintas provinsi	1 kawasan	15 kawasan ^{K)}	15,0
			Jumlah wilayah sungai yang mendapatkan fasilitasi penataan ruang lintas wilayah	6 ws	69 ws ^{K)}	85,7
7	Pembinaan PPNS bidang Penataan Ruang	Terbinanya PPNS bidang penataan ruang	Jumlah (orang) PPNS yang dibina	90 orang	500 orang ^{K)}	32,5
8	Perumusan Kebijakan, Program dan Anggaran, Kerjasama Luar Negeri serta Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Kegiatan	Laporan kinerja penyelenggaraan penataan ruang di pusat dan daerah	Jumlah kegiatan evaluasi kinerja penyelenggaraan penataan ruang	7 kegiatan	40 kegiatan ^{K)}	42,0
9	Perencanaan tata ruang serta koordinasi pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang kawasan metropolitan serta pembinaan pelaksanaan pengembangan permukiman	Tersusunnya strategi pengembangan kelembagaan inovasi perencanaan <i>e-planning</i> , penetapan zonasi kegiatan di kota dan penetapan bank lahan untuk pembangunan di perkotaan	Jumlah kajian strategi pengembangan kelembagaan inovasi perencanaan <i>e-planning</i> , penetapan zonasi kegiatan di kota dan penetapan bank lahan untuk pembangunan di perkotaan	3 kajian	15 kajian ^{K)}	24,5
		Terselenggaranya penyediaan basis data dan informasi perkotaan	Jumlah pemutakhiran basis data informasi perkotaan	1 kegiatan	5 kegiatan ^{K)}	20,0
		Meningkatnya upaya pengelolaan lingkungan dan mitigasi bencana alam dalam perencanaan dan pelaksanaan rencana pembangunan perkotaan	Jumlah kota pusaka, rawan bencana dan PKPD yang ditingkatkan kualitas pengembangannya perkotaan dan kapasitas kelembagaannya	3 kota	31 kota ^{K)}	62,0

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

No.	PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil Outcomes/ Output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
		Terlaksananya pengembangan perkotaan beserta kapasitas kelembagaannya, terutama kota-kota baru dan kota-kota yang berkembang pesat	Jumlah kota yang memperoleh pembinaan teknis pelaksanaan pengembangan perkotaan dan kapasitas kelembagaannya	18 kota	109 kota ^{K)}	74,1
V	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya					2.894,2
VI	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Pekerjaan Umum					841,0
VII	Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara					739,6
VIII	Penelitian dan Pengembangan Kementerian PU					2.027,0
IX	Penyelenggaraan Pembinaan Konstruksi	Meningkatnya kapasitas dan kinerja pembina jasa konstruksi Pusat dan daerah	Meningkatnya kapasitas dan kinerja pembina jasa konstruksi Pusat dan daerah dengan indikator Indeks pembinaan jasa konstruksi nasional dan daerah			1.389,0
TOTAL ALOKASI KEMENTERIAN PU 2010-2014						268.804,3

K : Angka kumulatif 5 tahun (2010-2014)

**RENCANA TINDAK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH 2010-2014
PER KEMENTERIAN/LEMBAGA**

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENKO POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN

NO	PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
I	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Meningkatnya dukungan administratif dan pelaksanaan operasional KemenkoPolhukam	1. % penyelenggaraan dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya yang profesional, akuntabel, efisien dan efektif	80%	95%	406,6
			2. % persiapan reformasi birokrasi oleh seluruh K/L di bawah koordinasi Kemenko Polhukam	80%	95%	
			3. Jumlah K/L di bawah lingkup koordinasi Kemenko Polhukam yang melaksanakan program 100 hari tepat waktu	100%	100%	
II	Program Peningkatan Koordinasi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan	1. Meningkatnya efektivitas koordinasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan politik dalam negeri	% rekomendasi kebijakan politik dalam negeri yang dilaksanakan oleh kementerian teknis dan pemda.	60%	80%	307,6
2.1	Koordinasi Pemantapan Demokratisasi dan Kelembagaan	Terselenggaranya koordinasi kebijakan pemantapan demokratisasi dan kelembagaan	1. Jumlah Rapat Koordinasi Pemantapan Demokratisasi dan Kelembagaan	12	60 ^{K)}	39,9
			2. Jumlah dokumen Indeks demokrasi Indonesia	-	3 dok ^{K)}	
			3. Jumlah pelaksanaan pemantauan dan evaluasi	4	20 ^{K)}	
2.2	Koordinasi Pengelolaan Pemantapan Otonomi	Terselenggaranya Koordinasi Kebijakan Pengelolaan Pemantapan Otonomi Khusus	1. Jumlah Rapat Koordinasi Otonomi Khusus	12	60 ^{K)}	35,2
			2. Jumlah pemantauan dan evaluasi	4	20 ^{K)}	
			3. Jumlah rapat koordinasi Desk Papua	12	60 ^{K)}	
			4. Jumlah pemantauan perkembangan sosial politik di Papua	4	20 ^{K)}	
			2. Meningkatnya efektivitas koordinasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan politik luar negeri	% tindak lanjut rekomendasi kebijakan politik luar negeri yang dilaksanakan oleh kementerian teknis dan Pemda	60%	

NO	PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
2.3	Koordinasi strategi politik luar negeri	Terselenggaranya koordinasi kebijakan strategi politik luar negeri	1. Jumlah rapat koordinasi peningkatan kualitas strategi politik luar negeri	12	60 ^{K)}	2,8
			2. Jumlah pemantauan dan evaluasi	4	20 ^{K)}	
2.4	Koordinasi kerjasama ASEAN	Terselenggaranya koordinasi kebijakan kerjasama ASEAN	1. Jumlah rapat koordinasi pelaksanaan cetak biru komunitas ASEAN dan kerjasama ASEAN	12	60 ^{K)}	2,8
			2. Jumlah pemantauan dan evaluasi	4	20 ^{K)}	
2.5	Koordinasi kerjasama Asia, Pasifik dan Afrika	Terselenggaranya koordinasi kebijakan kerjasama Asia, Pasifik dan Afrika	1. Jumlah Rapat Koordinasi peningkatan kualitas kerjasama Asia, Pasifik dan Afrika	12	60 ^{K)}	2,8
			2. Jumlah pemantauan dan evaluasi	4	20 ^{K)}	
2.6	Koordinasi kerjasama Amerika dan Eropa	Terselenggaranya koordinasi kebijakan kerjasama Amerika dan Eropa	1. Jumlah Rapat Koordinasi peningkatan kualitas kerjasama Amerika dan Eropa	12	60 ^{K)}	2,8
			2. Jumlah pemantauan dan evaluasi	4	20 ^{K)}	
2.7	Koordinasi hubungan multilateral	Terselenggaranya koordinasi kebijakan hubungan multilateral	1. Jumlah rapat koordinasi peningkatan kualitas hubungan multilateral	12	60 ^{K)}	2,8
			2. Jumlah pemantauan dan evaluasi	4	20 ^{K)}	
		3. Meningkatnya efektivitas koordinasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan hukum dan hak azasi manusia	% tindak lanjut rekomendasi kebijakan hukum dan hak azasi manusia yang dilaksanakan oleh kementerian teknis dan penda	60%	80%	49,4
		4. Meningkatnya efektivitas koordinasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan pertahanan negara	Rasio tindak lanjut rekomendasi kebijakan pertahanan negara yang dilaksanakan oleh kementerian teknis	75%	90%	39,9
2.8	Koordinasi wilayah negara dan tata ruang pertahanan	Terselenggaranya koordinasi kebijakan wilayah negara dan tata ruang pertahanan	1. Jumlah Rapat Koordinasi Wilayah Negara dan Tata Ruang Pertahanan	12	60 ^{K)}	20,6
			2. Jumlah Rapat Koordinasi Pembentukan Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan	12	12 ^{K)}	
			3. Jumlah koordinasi pemetaan batas wilayah RI dengan Malaysia, PNG, Timor Leste, Singapura dan Palau	12	60 ^{K)}	
			4. Jumlah pemantauan dan evaluasi	8	40 ^{K)}	
			5. Jumlah rapat koordinasi Desk Wiltas dan PPKT	12	60 ^{K)}	
			6. Jumlah pemantauan perkembangan sosial politik di wiltas dan PPKT	4	20 ^{K)}	

NO	PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
		5. Meningkatnya efektivitas koordinasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan keamanan nasional	% rekomendasi kebijakan keamanan nasional yang ditindaklanjuti oleh kementerian teknis dan Pemda	60%	80%	66,8
2.9	Koordinasi penanganan kejahatan transnasional dan terorisme	Terselenggaranya koordinasi kebijakan penanganan kejahatan transnasional dan terorisme	1. Jumlah Rapat Koordinasi Urusan Kejahatan Transnasional dan Terorisme	12	60 ^{K)}	14,5
			2. Jumlah pemantauan dan evaluasi	4	20 ^{K)}	
			3. Jumlah Rapat Koordinasi Urusan Terorisme Bersama dengan DKPT	12	60 ^{K)}	
			4. Jumlah Rapat Koordinasi Desk Koordinasi Pemberantasan Terorisme	12	60 ^{K)}	
			5. Jumlah pemantauan dan evaluasi perkembangan terorisme termasuk modus operandi	4	20 ^{K)}	
			6. Jumlah Rapat Koordinasi Pengelolaan Peningkatan kapasitas DKPT menjadi BKPT	12	60 ^{K)}	
2.10	Koordinasi penanganan konflik dan kontijensi	Terselenggaranya Koordinasi Kebijakan Penanganan Konflik dan Kontijensi	1. Jumlah Rapat Koordinasi Penanganan Konflik dan Kontijensi	12	60 ^{K)}	36,1
			2. Jumlah pemantauan dan evaluasi	4	20 ^{K)}	
			3. Jumlah rapat koordinasi Desk Aceh	12	60 ^{K)}	
			4. Jumlah pemantauan perkembangan sosial politik di NAD	4	20 ^{K)}	
			5. Jumlah Rapat Koordinasi Desk Sulteng	12	60 ^{K)}	
			6. Jumlah pemantauan dan evaluasi perkembangan sosial politik di Sulteng	4	20 ^{K)}	
		6. Meningkatnya efektivitas koordinasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan kesatuan bangsa	% tindak lanjut rekomendasi kebijakan yang dilaksanakan oleh kementerian teknis dan Pemda	60%	80%	17,1
2.11	Koordinasi pengelolaan masyarakat kawasan tertinggal	Terselenggaranya koordinasi kebijakan pengelolaan masyarakat kawasan tertinggal	1. Jumlah Rapat Koordinasi Pengelolaan Masyarakat Kawasan Tertinggal	12	60 ^{K)}	3,4
			2. Jumlah pemantauan dan evaluasi	4	20 ^{K)}	

NO	PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
2.12	Koordinasi wawasan kebangsaan	Terselenggaranya koordinasi kebijakan wawasan kebangsaan	1. Jumlah Rapat Koordinasi Wawasan Kebangsaan	12	60 ^{K)}	3,4
			2. Jumlah pemantauan dan evaluasi	4	20 ^{K)}	
		7. Meningkatnya efektivitas koordinasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan komunikasi dan informasi di bidang politik, hukum dan keamanan	Rasio tindak lanjut rekomendasi kebijakan yang dilaksanakan oleh kementerian teknis dan Pemda	60%	80%	22,6
2.13	Koordinasi media center dan kehumasan	Terselenggaranya koordinasi kebijakan media center dan kehumasan	1. Jumlah Rapat Koordinasi penguatan Media Center dan Kehumasan	12	60 ^{K)}	3,4
			2. Jumlah Rapat Koordinasi KIP	12	60 ^{K)}	
			3. Jumlah pemantauan dan evaluasi	4	20 ^{K)}	
III	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Memadainya sarana dan prasarana aparatur	Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana aparatur	60%	80%	43,4
IV	Program Peningkatan Koordinasi Keamanan dan Keselamatan di Laut	1. Meningkatnya dukungan administrasi dan teknis Menkopolkukam-Bakorkamla 2. Meningkatnya operasi bersama keamanan laut	1. Terpenuhinya kebutuhan seluruh unit organisasi Bakorkamla	30%	32%	1.246,9
			2. Jumlah dan cakupan operasi bersama keamanan laut	30%	32%	
4.1	Peningkatan koordinasi pengawasan keamanan laut	Meningkatnya efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pengawasan keamanan laut	Penyelesaian sistem <i>early warning</i> dan <i>sea surveillance</i> termasuk integrasinya	15%	100%	570,3
4.2	Peningkatan operasi bersama keamanan laut	Menurunnya angka pelanggaran hukum di laut	Menurunnya angka pelanggaran hukum di laut	30%	32%	232,0
TOTAL ALOKASI KEMENKO POLHUKAM 2010-2014						2.004,5

K : Angka kumulatif 5 tahun (2010-2014)

**RENCANA TINDAK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH 2010-2014
PER KEMENTERIAN/LEMBAGA**

KEMENTERIAN/LEMBAGA: KEMENTERIAN KOORDINATOR PEREKONOMIAN

No	PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
1.	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya					206,4
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					117,5
3.	Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian					400,6
a.	Koordinasi Kebijakan Makro	Meningkatnya koordinasi kebijakan makro yang mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi	Persentase pelaksanaan rencana tindak kebijakan makro yang tepat waktu	50%	75%	3,0
b.	Koordinasi Kebijakan Pasar Modal, Perbankan Dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Meningkatnya koordinasi kebijakan pasar modal, perbankan dan lembaga keuangan bukan bank yang mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi	Persentase pelaksanaan rencana tindak kebijakan pasar modal, perbankan, dan lembaga keuangan bukan bank yang tepat waktu	60%	80%	3,5
c.	Koordinasi Kebijakan Kredit Usaha Rakyat (KUR)	Meningkatnya Koordinasi Kebijakan Kredit Usaha Rakyat (KUR)	Persentase Rekomendasi hasil koordinasi Kebijakan KUR yang terimplementasikan	60%	80%	3,1
d.	Koordinasi Penyusunan Skim Pembiayaan Kredit, Asuransi, dan Remitansi untuk Pekerja Migran	Meningkatnya Koordinasi Penyusunan Skim Pembiayaan Kredit, Asuransi, dan Remitansi untuk Pekerja Migran	Persentase Rekomendasi hasil koordinasi Kebijakan Koordinasi Pembiayaan Kredit, Asuransi, dan Remitansi untuk Pekerja Migran yang diimplementasikan	60%	80%	1,9
e.	Koordinasi Kebijakan Ketahanan Pangan	Meningkatnya koordinasi urusan ketahanan pangan	Persentase rekomendasi hasil koordinasi kebijakan bidang ketahanan pangan yang terimplementasikan	50%	90%	19,5

KEMENTERIAN/LEMBAGA: KEMENTERIAN KOORDINATOR PEREKONOMIAN

No	PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
f.	Koordinasi Kebijakan Bidang Perkebunan dan Hortikultura	Meningkatnya Koordinasi kebijakan di bidang Perkebunan dan Hortikultura	Persentase Rekomendasi hasil koordinasi Kebijakan perkebunan dan hortikultura yang diimplementasikan	85%	100%	11,6
g.	Koordinasi Kebijakan Bidang Pengembangan Urusan Perikanan dan Peternakan	Meningkatnya Koordinasi kebijakan di bidang Pengembangan Urusan Perikanan dan Peternakan	Persentase Rekomendasi hasil koordinasi Kebijakan Pengembangan Urusan Perikanan dan Peternakan yang diimplementasikan	85%	100%	11,8
h.	Koordinasi Pengembangan Kebijakan Pengembangan Bahan Bakar Nabati	Meningkatnya koordinasi kebijakan pengembangan bahan bakar nabati	Persentase rekomendasi hasil koordinasi kebijakan pengembangan bahan bakar nabati yang diimplementasikan	40%	75%	4,7
i.	Koordinasi Pengembangan Desa Mandiri Energi	Meningkatnya koordinasi pengembangan Desa Mandiri Energi	Persentase rekomendasi hasil koordinasi kebijakan dalam pelaksanaan kebijakan Desa Mandiri Energi yang ditindaklanjuti	40%	70%	5,7
j.	Koordinasi Dan Sinkronisasi Kebijakan Bidang Percepatan Penyediaan Dan Pemanfaatan Energi Alternatif	Meningkatnya koordinasi dan sinkronisasi implementasi kebijakan percepatan penyediaan dan pemanfaatan energi alternatif	Persentase rekomendasi hasil Koordinasi Dan Sinkronisasi Kebijakan Bidang Percepatan Penyediaan Dan Pemanfaatan Energi Alternatif yang terimplementasi	50%	90%	30,0
k.	Koordinasi Penataan Kelembagaan Pengembangan UKM Berbasis Inovasi	Meningkatnya kapasitas kewirausahaan UKM berbasis inovasi	Persentase rekomendasi hasil koordinasi kebijakan pengembangan UKM berbasis inovasi yang ditindaklanjuti;	70-75%	90-100%	24,7
l.	Koordinasi Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	Meningkatnya kualitas koordinasi kebijakan peningkatan dan pengembangan ekspor	Persentase rekomendasi hasil koordinasi kebijakan peningkatan dan pengembangan ekspor yang terimplementasikan	60-70%	95-100%	11,4
m.	Koordinasi Penataan Dan Pengembangan Sistem Logistik Nasional	Terkoordinasinya Pelaksanaan Kebijakan Penataan dan pengembangan Sistem Logistik Nasional	Persentase Rekomendasi hasil koordinasi Kebijakan Penataan dan Pengembangan Sistem Logistik Nasional yang ditindaklanjuti	60%	85%	7,6
n.	Koordinasi Peningkatan Ekspor dan Peningkatan Investasi (PEPI)	Meningkatnya Koordinasi di Bidang peningkatan Ekspor dan peningkatan Investasi	Persentase Rekomendasi hasil koordinasi kebijakan di Bidang Peningkatan Ekspor dan Investasi yang terimplementasikan	65%	85%	15,8

KEMENTERIAN/LEMBAGA: KEMENTERIAN KOORDINATOR PEREKONOMIAN

No	PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
o.	Koordinasi Pengembangan dan Penerapan sistem NSW dan ASW	Meningkatnya Koordinasi di Bidang Pengembangan dan Penerapan NSW dan ASW	Persentase Rekomendasi hasil koordinasi kebijakan di Bidang Pengembangan dan Penerapan NSW dan ASW yang terimplementasikan	80%	95%	16,2
p.	Koordinasi Pengembangan Urusan Infrastruktur Transportasi	Meningkatnya Koordinasi Urusan Infrastruktur Transportasi	Persentase rekomendasi hasil koordinasi kebijakan Urusan Infrastruktur Transportasi yang terimplementasi	60%	85%	19,3
q.	Koordinasi Pengembangan Urusan Penataan Ruang Dan Pengembangan Wilayah (termasuk KEK, KAPET, dan Kawasan Ekonomi lainnya)	a. Meningkatkan Koordinasi Urusan Penataan Ruang Dan Pengembangan Wilayah	Persentase rekomendasi hasil koordinasi kebijakan Urusan Penataan Ruang dan Pengembangan Wilayah yang terimplementasi	75%	90%	22,7
		b. Terselesaikannya Peraturan Penyelenggaraan KEK dan penetapan Lokasi KEK dan pengembangan KAPET	Persentase peraturan pelaksana UU KEK yang terselesaikan	60%	95%	-
			Jumlah Lokasi KEK yang ditetapkan	1	7 ^{K3}	-
r.	Koordinasi Pengembangan Kerjasama Ekonomi Dan Pembiayaan Eropa, Afrika Dan Timur Tengah	Meningkatnya koordinasi kerjasama ekonomi dan pembiayaan Eropa, Afrika dan Timur Tengah	Persentase hasil koordinasi kebijakan di bidang kerjasama ekonomi dan pembiayaan Eropa, Afrika dan Timur Tengah yang diimplementasikan	60-70%	95-100%	9,7
s.	Koordinasi Pengembangan Kerjasama Ekonomi Dan Pembiayaan Asia	Meningkatnya koordinasi kerjasama ekonomi dan pembiayaan Asia	Persentase rekomendasi hasil koordinasi kebijakan di bidang kerjasama ekonomi dan pembiayaan Asia yang diimplementasikan	60-70%	95-100%	9,7
TOTAL ALOKASI KEMENKO PEREKONOMIAN 2010-2014						724,5

K : Angka kumulatif 5 tahun (2010-2014)

**RENCANA TINDAK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH 2010-2014
PER KEMENTERIAN/LEMBAGA**

KEMENTERIAN/LEMBAGA: KEMENTERIAN KOORDINATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT

No	PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
I.	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Terlaksananya seluruh kegiatan pendukung pelaksanaan kegiatan-kegiatan koordinasi bidang kesejahteraan rakyat.	Persentase tersosialisasinya kegiatan bidang kesra melalui media massa.			265,5
			Jumlah LHP tepat waktu.		1 dokumen	
			Persentase pengelolaan keuangan tepat waktu.		100%	
			Persentase terpenuhinya sarana dan prasarana guna mendukung pelaksanaan operasional perkantoran.		100%	
			Jumlah pegawai yang memiliki kompetensi sesuai jabatan.		400 pegawai	
			Jumlah dokumen perencanaan yang dihasilkan.		4 dokumen	
			Jumlah kajian kebijakan bidang kesra.		7 dokumen	
II.	Pengembangan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Meningkatnya koordinasi dalam mengembangkan dan menyerasikan kebijakan kesra dalam upaya Penanggulangan kemiskinan dan pengurangan pengangguran serta Tanggap Cepat Masalah kesra dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat.	Jumlah kegiatan koordinasi sesuai bidang yang dilaksanakan	30 kegiatan koordinasi	30 kegiatan koordinasi	475,9

KEMENTERIAN/LEMBAGA: KEMENTERIAN KOORDINATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT

No	PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
1.	Penataan Kelembagaan Jaminan Sosial Nasional (Dewan Jaminan Sosial Nasional)	1. Tersedianya NIK bagi setiap peserta jaminan sosial;	NIK sudah terlaksana bagi seluruh masyarakat (bekerja sama dengan Depdagri).	30%	100%	50,1
		2. Tersusunnya perangkat hukum SJSN;	1. UU BPJS	100%	100%	
			2. PP PBI			
			3. PP Jaminan Kesehatan			
			4. PP Kepesertaan (bekerja sama dengan Depkes, Depnaker, Dephan, MenPAN, Depkeu)			
		3. Tersusunnya berbagai studi dan kajian di bidang jaminan sosial untuk memperkuat pelaksanaan SJSN.	PP Pensiun; Jaminan Kecelakaan Kerja; Jaminan Hari Tua; dan Jaminan Kematian (bekerja sama dengan Depkeu)	80%	100%	
			PP Tata Pengelolaan dan Pengembangan Dana Jaminan Sosial (bekerja sama dengan Depkeu)	30%	100%	
			Unit Permodelan Keuangan SJSN (bekerja sama dengan Depkeu)	100%	100%	
		4. Terharmonisasinya regulasi di bidang jaminan sosial;	Studi Lansia, Pensiun, Jamkesmas, Pekerja Informal (bekerja sama dengan Bappenas).		100%	
			Studi Keterkaitan Pembiayaan SJSN dengan Aturan Perdagangan, Ketenagakerjaan, Perpajakan dan Investasi (bekerja sama dengan Depkeu).		100%	
Harmonisasi dengan UU Dana Pensiun (bekerja sama dengan Depkeu)			100%			

KEMENTERIAN/LEMBAGA: KEMENTERIAN KOORDINATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT

No	PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
			Harmonisasi dengan UU Jamsostek (bekerjasama dengan Depnaker)		100%	
		5. Terselenggaranya jaminan sosial berbasis asuransi bagi seluruh pekerja formal maupun informal dengan prioritas utama asuransi kesehatan; dan terciptanya sistem, prosedur, serta struktur organisasi penyelenggara jaminan sosial yang efisien dan efektif;	1. Rencana Transisi BPJS	100%	100%	
			2. Rencana detil organisasi dan anggaran pengendali BPJS			
			3. Memulai pendaftaran pemberi kerja dan pekerja			
			4. Rencana Pendataan dan Jumlah Kontribusi			
			5. Merancang sosialisasi pada masyarakat			
			6. Membangun strategi pengembangan fasilitas kesehatan			
			7. Negosiasi dengan penyedia layanan kesehatan dan menyusun skema monitoringnya (bekerja sama dengan Depkeu dan Depkes)			
			Implementasi model manajemen tabungan hari tua pada BPJS (bekerja sama dengan Depkeu)		100%	
		6. Meningkatnya jangkauan/cakupan jaminan sosial terhadap pekerja miskin (yang tidak mampu memberikan kontribusi/iuran);	Jumlah peserta jaminan sosial dari masyarakat/pekerja miskin (bekerja sama dengan Depnaker)			
		7. Meningkatnya kualitas manfaat jaminan sosial bagi pekerja;	Kualitas manfaat jaminan sosial (bekerja sama dengan Depnaker).			
TOTAL ALOKASI KEMENTERIAN KOORDINATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT 2010-2014						741,4

K : Angka kumulatif 5 tahun (2010-2014)

**RENCANA TINDAK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH 2010-2014
PER KEMENTERIAN/LEMBAGA**

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

NO	PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2.014	
1	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata	Meningkatnya kualitas pelayanan, pengelolaan, perencanaan dan pelaksanaan yang ditunjang oleh pembinaan administrasi dan keuangan Kemenbudpar	1. Jumlah dokumen pelaksanaan pembinaan administrasi serta dokumen perencanaan dan hukum	94	488 ^{K)}	805,9
			2. Jumlah Publikasi informasi kebudayaan dan pariwisata	12	79 ^{K)}	
			3. Jumlah penyelenggaraan administrasi kepegawaian dan organisasi dilingkungan Kemenbudpar	33	208 ^{K)}	
			4. Jumlah peserta Diklat Aparatur Negara	1.593	9.222 ^{K)}	
			5. Jumlah kerjasama internasional bidang kebudayaan dan pariwisata	47	260 ^{K)}	
			6. Jumlah informasi kebudayaan dan pariwisata dan jumlah media informasi	16	122 ^{K)}	
			7. Jumlah fasilitasi dan pendukung kegiatan pembangunan kebudayaan dan pariwisata Pusat dan Daerah	4	30 ^{K)}	
2	Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana aparatur	Jumlah pengadaan dan pemeliharaan Inventaris kantor	148	743 ^{K)}	188,7
3	Pengawasan Dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata	1. Meningkatkan akuntabilitas kinerja satuan kerja/unit kerja di lingkungan Kemenbudpar	1. Persentase satuan kerja yang telah melaksanakan sistem AKIP	100	100	137,6
			2. Meningkatkan keandalan SDM Pengawas didukung dengan SOP Pengawas	100	100	
			3. Jumlah SOP pengawasan yang telah ditetapkan dan dilaksanakan	9	27 ^{K)}	

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

NO	PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
4	Pengembangan Nilai Budaya, Seni dan Perfilman	1. Meningkatnya internalisasi, revitalisasi, dan reaktualisasi nilai-nilai budaya yang mendukung pembangunan karakter dan pekerti bangsa. 2. Meningkatnya apresiasi terhadap keragaman seni budaya dan perfilman. 3. Meningkatnya kreatifitas, dan produktifitas 4. Tersedianya sarana bagi pengembangan, pendalaman dan pagelaran seni budaya di kota besar dan ibukota kabupaten/kota	1. Jumlah peserta sosialisasi dan intenalisasi nilai nilai budaya	1.200	6.900 ^{K)}	1.542,1
			2. Jumlah reaktualisasi, inventarisasi, dan dokumentasi karya budaya	220	1.100 ^{K)}	
			3. Jumlah produksi film nasional yang berkualitas	75	391 ^{K)}	
			4. Jumlah karya seni budaya yang memperoleh perlindungan hak kekayaan intelektual	400	2.000 ^{K)}	
			5. Jumlah fasilitasi pertunjukan, pameran, festival karya seni budaya dan film	83	415 ^{K)}	
			6. Jumlah fasilitasi sarana pengembangan, pendalaman, dan pertunjukan seni budaya	25	529 ^{K)}	
4.1	Pelestarian dan Pengembangan Kesenian	Meningkatnya apresiasi, kreativitas, dan produktivitas para pelaku seni	1. Jumlah fasilitasi pertunjukan, pameran, festival, lomba, dan pawai	20	100 ^{K)}	174,2
			2. Jumlah reaktualisasi kesenian yang hampir punah	2	10 ^{K)}	
			3. Jumlah naskah inventarisasi karya seni budaya	25	125 ^{K)}	
			4. Jumlah fasilitasi sarana bagi pengembangan, pendalaman dan pertunjukan seni budaya	-	504 ^{K)}	
4.2	Pengembangan Perfilman Nasional	Meningkatnya kualitas dan kuantitas produksi film nasional	1. Jumlah Fasilitasi Festival Film dalam dan luar negeri	11	11	201,0
			2. Jumlah fasilitasi organisasi dan komunitas perfilman	18	18	
4.3	Peningkatan Sensor Film	Meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan lembaga sensor film	Jumlah film/video/iklan lulus sensor	40.000	221.000 ^{K)}	133,7
4.4	Pengembangan Galeri Nasional	Meningkatnya kualitas pengelolaan Galeri Nasional	1. Jumlah karya seni yang dipamerkan	1.750	2.000	219,2
			2. Jumlah karya seni yang diakuisisi	4	4	
			3. Jumlah karya seni rupa yang dipreservasi (konservasi dan restorasi)	75	415 ^{K)}	
			4. Jumlah fasilitasi prasarana pengembangan pusat kebudayaan nasional	-	1	
4.5	Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional	Meningkatnya pemanfaatan hasil hasil kajian sejarah dan nilai tradisional	Jumlah naskah kajian pelestarian sejarah dan nilai tradisional	110	1.157 ^{K)}	256,0

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

NO	PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
4.6	Pelestarian dan Pengembangan Nilai-Nilai Tradisi	Meningkatnya inventarisasi, revitalisasi, dan reaktualisasi nilai-nilai tradisi	1. Jumlah naskah inventarisasi nilai tradisi	50	50	31,6
			2. Jumlah karya budaya bernilai tradisi hasil reaktualisasi	5	25	
4.7	Pembangunan Karakter dan Pekerti Bangsa	Meningkatnya internalisasi nilai-nilai budaya yang mendukung pembangunan karakter dan pekerti bangsa	1. Jumlah peserta internalisasi dan sosialisasi karakter dan pekerti bangsa	600	3.900	50,0
			2. Jumlah pelaku budaya penerima penghargaan	50	300	
4.8	Pengembangan Masyarakat Adat	Meningkatnya pemberdayaan komunitas adat	1. Jumlah fasilitasi dan advokasi komunitas adat	32	32	26,0
			2. Jumlah naskah inventarisasi komunitas adat	10	10	
4.9	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Nilai Budaya, Seni dan Film	Meningkatnya manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya dalam rangka pengembangan nilai budaya, seni dan perfilman	1. Jumlah fasilitasi sarana pengembangan, pendalaman, dan pergelaran seni budaya	25	25	450,5
			2. Jumlah fasilitasi prasarana pengembangan pusat kebudayaan nasional	1	1	
5	Kesejarahan, Kepurbakalaan, dan Permuseuman	1. Meningkatnya internalisasi nilai kesejarahan dan wawasan kebangsaan yang mendukung pembangunan karakter dan jati diri bangsa	1. Jumlah peserta internalisasi dan sosialisasi nilai-nilai sejarah dan sejarah kewilayahan Indonesia	5.600	37.500	2.091,3
			2. Jumlah warisan budaya dunia dan cagar budaya nasional yang ditetapkan dan dikelola secara terpadu	1	9	
		3. Meningkatnya kualitas pelayanan dan pengelolaan museum, termasuk naskah-naskah kuno	3. Jumlah benda cagar budaya yang dilindungi dan dipelihara	2.100	7.700	
			4. Jumlah situs dan kawasan cagar budaya yang dilindungi, dipelihara, dan dieksplorasi	2.226	2.490	
			5. Jumlah museum yang memenuhi standar pelayanan dan pengelolaan	4	79	
			6. Jumlah koleksi naskah kuno yang diselamatkan dan dikelola	3.120	4.000	
5.1	Pengembangan Nilai Sejarah	Meningkatnya internalisasi nilai-nilai sejarah	1. Jumlah naskah sejarah	3	15	28,0
			2. Jumlah peserta internalisasi dan sosialisasi nilai-nilai sejarah	5.200	33.300	

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

NO	PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
5.2	Pengembangan Geografi Sejarah	Meningkatnya pemahaman dan apresiasi masyarakat terhadap sejarah kewilayahan Indonesia	1. Jumlah naskah sejarah kewilayahan Indonesia	5	29 ^{K)}	28,0
			2. Jumlah peta/atlas geografi sejarah	1	11 ^{K)}	
			3. Jumlah peserta internalisasi dan sosialisasi sejarah kewilayahan Indonesia	400	4.200 ^{K)}	
5.3	Pengembangan Pengelolaan Peninggalan Bawah Air	Meningkatnya kualitas perlindungan, pemeliharaan, pengembangan, dan pemanfaatan peninggalan bawah air	1. Jumlah situs bawah air yang diidentifikasi, diinventarisasi, dipetakan, ditetapkan, dan dieksplorasi	8	73 ^{K)}	34,7
			2. Jumlah BCB bawah air yang diselamatkan, diamankan, dirawat, diawetkan, dan dimanfaatkan	1.000	6.000	
5.4	Pengembangan Pengelolaan Peninggalan Kepurbakalaan	Meningkatnya kualitas perlindungan, pemeliharaan, pengembangan, dan pemanfaatan BCB/Situs dan Kawasan keurbakalaan secara terpadu	1. Jumlah warisan budaya dunia dan cagar budaya nasional yang ditetapkan dan dikelola secara terpadu	1	9 ^{K)}	67,9
			2. Jumlah BCB/situs/kawasan yang diinventarisasi dan ditetapkan secara nasional	1.100	1.700	
			3. Jumlah cagar budaya nasional yang dinominasikan dan didaftarkan sebagai warisan dunia	4	4	
5.5	Pengembangan Pengelolaan Permuseuman	Meningkatnya kualitas pengelolaan dan pelayanan museum, termasuk museum daerah	1. Jumlah koleksi dan naskah yang dikelola	620	1.500	395,8
			2. Jumlah museum yang direvitalisasi	4	84 ^{K)}	
			3. Jumlah Museum Berskala Nasional yang dikembangkan	1	2 ^{K)}	
			4. Jumlah pengunjung museum.	56.500	371.000 ^{K)}	
5.6	Pengembangan Pengelolaan Museum Nasional	Meningkatnya kualitas pengelolaan dan pelayanan museum nasional	1. Jumlah koleksi dan naskah yang dikelola	2.500	2.500	230,6
			2. Jumlah penerbitan publikasi museum (eksemplar)	5.500	49.500 ^{K)}	
			3. Jumlah pengunjung museum nasional	200.000	1.500.000 ^{K)}	
			4. Luas pengembangan dan penataan gedung C, tempat penyimpanan (<i>storage</i>) dan ruang presentasi (m2)	1.142	89.538 ^{K)}	
5.7	Pelestarian Peninggalan Sejarah dan Purbakala	Meningkatnya kualitas perlindungan, pemeliharaan, pengembangan, dan pemanfaatan BCB/Situs dan Kawasan keurbakalaan	1. Jumlah Cagar Budaya/Situs/kawasan yang dilestarikan	2.218	2.470	1.036,8
			2. Jumlah inventarisasi dan pendaftaran peninggalan purbakala	2.600	2.600	
			3. Jumlah kajian pelestarian peninggalan purbakala	56	346 ^{K)}	
5.8	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Sejarah dan Purbakala	Terselenggaranya kegiatan koordinasi perencanaan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan, penyusunan kebijakan, peningkatan kualitas SDM	Jumlah fasilitasi sarana perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan keurbakalaan dan permuseuman	33	168 ^{K)}	269,6

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

NO	PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
6	Pengembangan Destinasi Pariwisata	Meningkatnya destinasi pariwisata yang berdaya saing tinggi di pasar global	1. Lama tinggal wisatawan (hari):			1.381,5
			1. Mancanegara	7,8	8 ^{K)}	
			2. Nusantara	2,1	3	
			2. Pengeluaran wisatawan harian:			
			1. Mancanegara (USD)	1000	2.000	
			2. Nusantara (Rp ribu)	600	750	
			3. Persentase investasi bidang pariwisata terhadap investasi nasional	5,19	6,43	
6.1	Pengembangan Daya Tarik Pariwisata	Meningkatnya kualitas dan kuantitas penataan daya tarik wisata	Jumlah daya tarik wisata alam, bahari dan budaya	7	29	101,3
6.2	Pemberdayaan Masyarakat di Destinasi Pariwisata	Meningkatnya kesadaran dan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan kepariwisataan	1. Jumlah kelompok sadar wisata	200	1.100 ^{K)}	65,0
			2. Jumlah masyarakat sadar wisata (orang)	4.000	22.000 ^{K)}	
6.3	Peningkatan PNPB Mandiri Bidang Pariwisata	Meningkatnya jumlah desa wisata	Jumlah desa wisata	200	2.000 ^{K)}	406,0
6.4	Pengembangan Usaha, Industri dan Investasi Pariwisata	Berkembangnya usaha, industri dan investasi pariwisata	1. Jumlah kebijakan usaha pariwisata (naskah)	8	48 ^{K)}	73,0
			2. Jumlah industri/asosiasi pariwisata yang mendapat dukungan	4	35 ^{K)}	
			3. Jumlah pola perjalanan (<i>travel pattern</i>)	6	37 ^{K)}	
			4. Jumlah profil investasi pariwisata	5	33 ^{K)}	
			5. Jumlah UMKM dan industri kreatif bidang pariwisata	8	48 ^{K)}	
6.5	Pengembangan Standardisasi Pariwisata	Terlaksananya penyusunan dan pemutakhiran standard pariwisata, serta penerapan standard dan kompetensi pariwisata	1. Jumlah standard kompetensi	8	38 ^{K)}	140,0
			2. Jumlah standard usaha	6	32 ^{K)}	
			3. Jumlah materi uji kompetensi dan pedoman sertifikasi usaha	8	36 ^{K)}	
			4. Jumlah master assesor dan assesor	1.000	5.000 ^{K)}	
			5. Jumlah Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) dan LSU pariwisata	7	36 ^{K)}	
			6. Jumlah fasilitasi sertifikasi kompetensi (ribu orang)	10	50 ^{K)}	
			7. Jumlah tenaga kerja yang disertifikasi (ribu orang)	10	50 ^{K)}	

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

NO	PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
6.6	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Pengembangan Destinasi Pariwisata	Terselenggaranya kegiatan koordinasi perencanaan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan, penyusunan kebijakan, peningkatan kualitas SDM aparatur, dan dukungan teknis dalam meningkatkan kapasitas pengelolaan destinasi pariwisata	1. Jumlah kegiatan pemutakhiran basis data dan informasi destinasi	7	29	596,2
			2. Jumlah Organisasi Pengelolaan Destinasi (<i>Destination Management Organization /DMO</i>) (buah)	2	15	
			3. Jumlah dukungan fasilitas pariwisata (daya tarik)	7	29	
			4. Jumlah dukungan teknis pengembangan destinasi pariwisata	36	239	
7	Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Meningkatnya jumlah wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara	1. Jumlah kunjungan wisman (juta orang)	6,75	8,6	2.437,0
			2. Jumlah pergerakan wisnus (juta perjalanan)	230	276	
7.1	Peningkatan Promosi Pariwisata Luar Negeri	Meningkatnya partisipasi pariwisata Indonesia pada bursa, misi penjualan (<i>sales mission</i>) dan festival di tingkat internasional	1. Jumlah partisipasi pada bursa pariwisata internasional, pelaksanaan misi penjualan (<i>sales mission</i>), dan dukungan penyelenggaraan festival (<i>event</i>)	72	361	544,6
			2. Jumlah perwakilan promosi pariwisata Indonesia (<i>Indonesia Tourism Promotion Representative Officers</i>) di luar negeri (kota)	12	65	
7.2	Peningkatan Promosi Pariwisata Dalam Negeri	Meningkatnya jumlah <i>event</i> pariwisata dalam negeri	1. Jumlah penyelenggaraan promosi langsung (<i>direct promotion</i>), dan <i>event</i> pariwisata berskala nasional dan internasional (<i>event</i>)	43	220	225,6
			2. Jumlah dukungan <i>event</i> seni, budaya dan pariwisata daerah (<i>event</i>)	31	162	
7.3	Pengembangan Informasi Pasar Pariwisata	Meningkatnya pemanfaatan informasi pasar pariwisata oleh pelaku pariwisata	1. Jumlah dokumen hasil analisis pasar dalam dan luar negeri (naskah)	23	115	211,0
			2. Jumlah penyebaran informasi fokus pasar pariwisata Indonesia (naskah)	640	3.200	
			3. Jumlah peserta Perjalanan Pengenalan (<i>Familiarization Trip/Fam Trip</i>) sesuai target, jadwal, fokus pasar dan pasar potensial (media atau usaha)	100	550	
			4. Jumlah permintaan pasar untuk berkunjung ke Indonesia (transaksi)	8.000	44.000	

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

NO	PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
7.4	Peningkatan Publikasi Pariwisata	Meningkatnya kelengkapan informasi tujuan pariwisata Indonesia	1. Jumlah destinasi yang memiliki data dan informasi yang lengkap (daerah)	10	50 ^{ki}	724,7
			2. Jumlah bahan promosi cetak, promosi elektronik, publikasi media cetak, media elektronik dan media luar ruang (ribu buah)	1.150	5.706 ^{ki}	
			3. Jumlah bahan promosi cetak dan promosi elektronik yang didistribusikan (ribu eksemplar)	709	3.544 ^{ki}	
7.5	Peningkatan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi, dan Pameran (<i>Meeting, Incentive Travel, Conference, and Exhibition/ MICE</i>)	Meningkatnya penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi, dan Pameran (<i>Meeting, Incentive Travel, Conference, and Exhibition/ MICE</i>) nasional dan internasional di Indonesia	1. Jumlah daerah yang dikembangkan menjadi tujuan wisata MICE (daerah)	5	32 ^{ki}	229,7
			2. Jumlah promosi penyelenggaraan MICE	12	60 ^{ki}	
			3. Jumlah dukungan penawaran (<i>bidding</i>) dan penyelenggaraan MICE	56	292 ^{ki}	
7.6	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Pemasaran	Terselenggaranya kegiatan koordinasi perencanaan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan, penyusunan kebijakan, peningkatan kualitas SDM aparatur, dan dukungan teknis peningkatan pemasaran pariwisata	Jumlah <i>event</i> pengembangan kebijakan pemasaran dan promosi pariwisata oleh masyarakat dan daerah	102	476 ^{ki}	501,4
8	Pengembangan Sumber Daya Kebudayaan dan Pariwisata	Meningkatnya kapasitas sumber daya pembangunan kebudayaan dan pariwisata	1. Jumlah sumber daya yang dilatih di bidang kebudayaan dan kepariwisataan (orang)	1.150	5.865 ^{ki}	1.551,1
			2. Jumlah lulusan pendidikan tinggi kepariwisataan yang teresap di pasar tenaga kerja di dalam maupun luar negeri (orang)	1.241	6.831 ^{ki}	
			3. Jumlah penelitian dan pengembangan	165	850 ^{ki}	
8.1	Pengembangan SDM Kebudayaan dan Pariwisata	Meningkatnya kapasitas sumber daya manusia aparatur/industri dan masyarakat bidang kebudayaan dan pariwisata	Jumlah sumber daya yang dilatih di bidang kebudayaan dan kepariwisataan (orang)	1.150	5.865 ^{ki}	34,0
8.2	Penelitian dan Pengembangan Bidang Arkeologi	Meningkatnya penelitian dan pengembangan bidang arkeologi	Jumlah penelitian dan pengembangan bidang arkeologi	144	735 ^{ki}	246,1

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

NO	PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
8.3	Penelitian dan Pengembangan Bidang Kepariwisataan	Meningkatnya litbang pariwisata dalam mendukung kebijakan pembangunan kepariwisataan	Jumlah penelitian dan pengembangan bidang kepariwisataan	8	50 ^{K)}	36,0
8.4	Penelitian dan Pengembangan Bidang Kebudayaan	Meningkatnya litbang kebudayaan dalam mendukung kebijakan pembangunan kebudayaan	Jumlah penelitian dan pengembangan bidang kebudayaan	13	65 ^{K)}	36,0
8.5	Pengembangan Pendidikan Tinggi Bidang Pariwisata	Meningkatnya profesionalisme dan daya saing SDM bidang pariwisata di lembaga pendidikan tinggi pariwisata	1. Jumlah program studi	34	42	1.088,5
			2. Jumlah mahasiswa aktif (orang)	4.780	27.030 ^{K)}	
			3. Jumlah dosen (orang)	390	500	
			4. Jumlah lulusan pendidikan kepariwisataan di lembaga pendidikan tinggi pariwisata (orang)	1.241	6.831 ^{K)}	
			5. Jumlah penelitian dosen (naskah laporan)	79	588 ^{K)}	
8.6	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Pengembangan Sumber Daya Kebudayaan dan Pariwisata	Meningkatnya dukungan pelayanan manajemen sumber daya kebudayaan dan pariwisata	Jumlah pelayanan manajemen pengembangan sumber daya kebudayaan dan pariwisata	21	107 ^{K)}	110,5
TOTAL ALOKASI KEMENBUDPAR 2010-2014						10.135,2

K : Angka kumulatif 5 tahun (2010-2014)

**RENCANA TINDAK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH 2010-2014
PER KEMENTERIAN/LEMBAGA**

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN BUMN

No	PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
1	PROGRAM PEMBINAAN BUMN	<ul style="list-style-type: none"> · Terwujudnya Penerapan Best Practices GCG dan sistem penilaian kinerja · Meningkatnya peran BUMN dalam pengelolaan SDA strategis dan pertahanan nasional · Meningkatnya Laba BUMN · Meningkatnya peran BUMN untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional · Meningkatnya kualitas pelaksanaan penugasan pemerintah untuk pelayanan umum (PSO) · Meningkatnya peran BUMN dalam keberintisan usaha, dan pengembangan UMKM · Terwujudnya sistem pengelolaan BUMN yang semakin sehat dan kompetitif · Meningkatnya peran BUMN dalam percepatan prioritas pembangunan nasional 				372,0
a.	Dukungan pelaksanaan program prioritas Pemerintah bidang energi (Prioritas Nasional)	<ul style="list-style-type: none"> Risalah rapat Surat persetujuan Laporan hasil monitoring 	<ul style="list-style-type: none"> Risalah Surat Laporan 	<ul style="list-style-type: none"> 5 1 5 	<ul style="list-style-type: none"> 5 1 5 	13,8
b.	Restrukturisasi BUMN besar / penting / strategis (Prioritas Nasional)	<ul style="list-style-type: none"> Kajian Restrukturisasi BUMN Pelaksanaan Restrukturisasi Monitoring dan Evaluasi 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan Laporan Laporan 	<ul style="list-style-type: none"> 1 10 6 	<ul style="list-style-type: none"> 1 10 6 	62,2

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN BUMN

No	PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
e.	Penyusunan best practice GCG	Tersusunnya best practice GCG	paket	1	1	8,8
f.	Penetapan sistem remunerasi berbasis kinerja di BUMN	Peraturan mengenai sistem remunerasi	Peraturan			1,0
g.	Penyusunan peraturan mengenai penilaian kinerja di BUMN yang mengacu pada standar internasional	Peraturan mengenai penerapan sistem penilaian yang mengacu kepada standar internasional	Peraturan			0,8
h.	Kajian, evaluasi dan monitoring pendayagunaan aset BUMN	Inventarisasi dokumen yang terkait dengan pendayagunaan aset	Dokumen	3	3	16,8
i.	Penetapan target, monitoring, dan evaluasi kinerja BUMN	Risalah rapat RUPS/RPB	Risalah	282	282	93,5
j.	Penetapan peraturan pelaksanaan pemisahan administrasi keuangan PSO dan Perpres tentang SOP pelaksanaan PSO	Peraturan pelaksanaan pemisahan administrasi keuangan PSO dan Perpres tentang SOP pelaksanaan PSO	Peraturan	2		0,8
k.	Penyusunan peraturan perundangan yang mengarah pada perwujudan pengelolaan BUMN berbasis mekanisme korporasi murni	Terwujudnya harmonisasi peraturan perundangan yang mengarah pada perwujudan pengelolaan BUMN berbasis mekanisme korporasi murni	Peraturan		1	4,0
l.	Kajian BUMN rugi dan bermasalah	Berkurangnya jumlah BUMN Rugi dan Bermasalah	Laporan	1	1	25,0
m.	Penyusunan dan pelaksanaan Program Tahunan Privatisasi	Penyusunan Program Tahunan Privatisasi	Laporan	1	1	10,8
n.	Kajian rightsizing BUMN	Hasil kajian	Laporan	1	1	4,0
o.	Uji kepatutan dan kelayakan calon Direksi dan Dewan Komisaris	Terpilainya Direksi dan Komisaris	BUMN	20	20	25,0
p.	Dukungan pelaksanaan program prioritas Pemerintah bidang ketahanan pangan	Risalah rapat	Risalah	5	5	18,5
		surat persetujuan	Surat	1	1	
		Laporan hasil monitoring	Laporan	5	5	
q.	Dukungan pelaksanaan program prioritas Pemerintah bidang infrastruktur	Risalah rapat	Risalah	5	5	12,8
		surat persetujuan	Surat	1	1	
		Laporan hasil monitoring	Laporan	5	5	

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN BUMN

No	PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
2	PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN DUKUNGAN TEKNIS LAINNYA					361,6
3	PROGRAM PENINGKATAN PENGAWASAN DAN AKUNTABILITAS APARATUR NEGARA					12,0
4	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR NEGARA					22,0
TOTAL ALOKASI KEMENTERIAN BUMN 2010-2014						767,6

K : Angka kumulatif 5 tahun (2010-2014)

**RENCANA TINDAK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH 2010-2014
PER KEMENTERIAN/LEMBAGA**

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
1	PENINGKATAN KEMAMPUAN IPTEK UNTUK PENGUATAN SISTEM INOVASI NASIONAL					1.850,0
a.	Penguatan kompetensi lembaga litbang	Berkembangnya pusat-pusat unggulan iptek	Jumlah pusat-pusat unggulan iptek	1	1	5,0
b.	Pengembangan budaya iptek	Terbangunnya kawasan percontohan pengembangan budaya masyarakat yang kreatif dan inovatif	Jumlah kawasan percontohan	1	1	5,0
c.	Peningkatan kapasitas SDM iptek (PN11)	Meningkatnya kapasitas SDM iptek	Jumlah karyasiswa	S2 = 50, S3 = 10	S2 = 50, S3 = 25	250,0
d.	Peningkatan sarana dan prasarana litbang	Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana litbang yang memadai	Jumlah lab yang telah direvitalisasi	1	1	5,0
e.	Litbang Ketahanan Pangan (PN5)	Kebijakan peningkatan dukungan litbang untuk ketahanan pangan khususnya pengembangan pupuk ekologis dan benih unggul-adaptif terhadap lingkungan sub-optimal, teknologi panen, teknologi pengelolaan lahan marginal untuk produksi pangan,	Jumlah kebijakan	3	3	50,0
			Jumlah riset bersama	4	4	
f.	Dukungan iptek untuk penciptaan dan pemanfaatan sumber energi baru dan terbarukan (PN 8)	Kebijakan peningkatan dukungan iptek untuk penciptaan dan pemanfaatan sumber energi baru dan terbarukan, termasuk koordinasi kebijakan untuk persiapan pembangunan PLTN	Jumlah kebijakan	1	1	25,0
			Jumlah riset bersama	2	2	
			Paket Koordinasi		1	50,0

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI

NO,	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
g.	Dukungan litbang untuk penurunan emisi gas CO2 dan adaptasi perubahan iklim (PN9)	Kebijakan peningkatan dukungan litbang untuk penurunan emisi gas CO2 dan adaptasi perubahan iklim	Jumlah kebijakan	5	5	49,0
			Jumlah riset bersama	5	5	
h.	Pendayagunaan teknologi mitigasi bencana (PN9)	Kebijakan pendayagunaan teknologi mitigasi bencana	Jumlah kebijakan	1	1	49,0
		Tersusunnya Standard Operation Procedure (SOP) Peningkatan kapasitas respons aparaturnya pemerintah dalam peringatan dini dan penanganan bencana	Jumlah SOP		1	
i.	Dukungan pengembangan dan pendayagunaan teknologi pendukung pembangunan daerah tertinggal, terdepan dan pasca konflik serta penyelesaian pemetaan wilayah perbatasan RI (PN10)	Kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pengembangan dan pendayagunaan teknologi pendukung pembangunan daerah tertinggal, terdepan dan pasca konflik, penyelesaian pemetaan wilayah perbatasan RI dengan Malaysia, Papua Nugini, Timor Leste, dan Filipina	Jumlah kebijakan	1	1	5,0
			Jumlah pilot pendukung teknologi untuk pembangunan daerah tertinggal	1	1	
j.	Fasilitasi proses perolehan hak paten dan kepemilikan HKI produk teknologi dan produk kreatif (PN11)	Kebijakan untuk fasilitasi proses perolehan hak paten dan kepemilikan HKI produk teknologi dan produk kreatif	Jumlah kebijakan	1	1	10,0
k.	Pelaksanaan Insentif Perolehan Paten dan Kepemilikan HKI	Terlaksananya insentif perolehan paten dan kepemilikan HKI	Jumlah usulan paten dan kepemilikan HKI yang difasilitasi	10	10	
l.	Peningkatan kemampuan inovasi dan kreativitas pemuda	Kebijakan peningkatan kemampuan inovasi dan kreativitas pemuda	Jumlah kebijakan	1	1	15,0
			Jumlah pilot peningkatan inovasi dan kreativitas pemuda	4	4	
m.	Pelaksanaan Insentif riset dasar dan terapan	Terlaksananya insentif riset dasar dan terapan	Jumlah paket riset dasar	44	35	150,0
			Jumlah paket riset terapan	78	60	
n.	Peningkatan litbang iptek unggulan di bidang kesehatan, obat-obatan dan instrumentasi medis	Meningkatnya litbang iptek unggulan di bidang kesehatan, obat-obatan dan instrumentasi medis	Jumlah paket penelitian	5	5	225,0

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI

NO,	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
o.	Pelaksanaan insentif difusi iptek	Terlaksananya insentif difusi iptek	Jumlah paket	92	75	325,0
p.	Pelaksanaan insentif peningkatan kapasitas iptek sistem produksi	Terlaksananya insentif peningkatan kapasitas iptek sistem produksi	Jumlah paket insentif	130	100	225,0
q.	Peningkatan dukungan teknologi bagi pemberdayaan industri strategis bidang pertahanan (PNL1)	Kebijakan dukungan teknologi untuk revitalisasi industri pertahanan	Jumlah kebijakan	1	1	25,0
			Jumlah kegiatan bersama hasil koordinasi dan sinkronisasi	1	1	
r.	Peningkatan Efektivitas Riset secara sinergi antara Perguruan Tinggi dgn Lembaga Litbang	Kebijakan peningkatan efektivitas riset secara sinergi antara perguruan tinggi dengan lembaga riset	Jumlah kebijakan	1	1	15,0
s.	Pengembangan jaringan kerjasama penelitian internasional	Meningkatnya jaringan kerjasama penelitian internasional	Jumlah kerjasama penelitian internasional	8	8	10,0
t.	Peningkatan promosi dan diseminasi iptek	Terlaksananya diseminasi iptek	Jumlah paket	10	10	75,0
u.	Peningkatan Pemanfaatan dan Pengembangan Perangkat Lunak Berbasis Open Source	Meningkatnya pemanfaatan perangkat lunak berbasis open source	Jumlah standarisasi	1	1	25,0
			Jumlah pilot implementasi interoperabilitas teknologi informasi dan komunikasi	5	5	
2	DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS LAINNYA					499,2
3	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR					116,9
TOTAL ALOKASI KEMENTERIAN NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI 2010-2014						2.466,1

K : Angka kumulatif 5 tahun (2010-2014)

**RENCANA TINDAK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH 2010-2014
PER KEMENTERIAN/LEMBAGA**

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
1.	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP					2.733,8
1	Pengelolaan Kualitas Air dan Kawasan Gambut	Tersedianya perangkat kebijakan pengelolaan kualitas air, ekosistem gambut dan ekosistem danau yang terpadu dan bersifat lintas K/L , antara lain Kemen PU, Kemenhut, Kementan, Penda	% penyiapan penetapan kelas air di tingkat kabupaten/kota untuk 13 sungai-sungai prioritas dari 119 kabupaten/kota, yang terkoordinasi lintas K/L dan daerah	25%	100% ^{KJ}	176,5
			Jumlah pembinaan teknis pengelolaan kualitas air terhadap 119 kabupaten/kota di 13 DAS, yang terkoordinasi dengan K/L terkait, termasuk DAS Citarum secara terpadu lintas K/L	20%	100% ^{KJ}	
			% penyiapan pemetaan kesatuan hidrologi gambut yang terkoordinasi dengan K/L terkait	10%	100% ^{KJ}	
			Jumlah provinsi dilakukannya verifikasi karakteristik ekosistem gambut yang terkoordinasi dengan K/L terkait	1	33 ^{KJ}	
			Tersusunnya Program dan Rencana Aksi Terpadu Pengelolaan Ekosistem 15 Danau Prioritas Berkelanjutan yang terkoordinasi dengan K/L terkait	15	15	
			Jumlah pemantauan dan evaluasi pengendalian kerusakan ekosistem situ yang terkoordinasi dengan K/L terkait	3	11	

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
2	Peningkatan Konservasi dan Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan	Meningkatnya kualitas kebijakan konservasi dan pengendalian kerusakan hutan dan lahan yang terpadu dan bersifat lintas K/L, antara lain dengan Kemenhut, BPN dan Pemda	Jumlah kebijakan konservasi dan pengendalian kerusakan hutan dan lahan yang ditetapkan/ diterbitkan (kriteria dan pedoman) yang terkoordinasi antar K/L dan daerah terkait	3	15 ^{KJ}	143,3
			Data sebaran hotspot di 8 Provinsi rawan kebakaran hutan dan lahan yang didiseminasi ke K/L dan daerah terkait	80%	80%	
			Diterapkannya mekanisme pencegahan kebakaran hutan dan lahan di 8 Provinsi rawan kebakaran hutan dan lahan yang terkoordinasi antar K/L dan daerah	8	8	
			Data kondisi kerusakan hutan dan lahan pada 11 DAS prioritas dan berpotensi rawan longsor yang terkoordinasi antar K/L terkait	80%	80%	
			Data tutupan lahan dan perubahan penggunaan lahan (land use change) melalui Program Menuju Indonesia Hijau	100%	100%	
			Jumlah provinsi (pendekatan ekosistem) yang dipantau sesuai data potensi dan kejadian bencana	10	30	
			% rekomendasi kebijakan konservasi an pengendalian kerusakan hutan dan lahan yang diimplementasikan daerah dari jumlah propinsi yang dipantau setiap tahunnya	50%	50%	
3	Pengawasan dan Evaluasi Pemanfaatan Ruang	Terlaksananya pengawasan pemanfaatan ruang dan evaluasi pemanfaatan ruang berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan yang terpadu dan bersifat lintas K/L.	% penyelesaian dokumen konsep, naskah akademis, pedoman dan peraturan perundang-undangan berkaitan dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan [dari 12 dokumen yang direncanakan] yang terkoordinasi antar K/L	16,7%	100%	95,7
			% penyelesaian dokumen pedoman kebijakan pengawasan pemanfaatan ruang berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan [dari 5 dokumen yang direncanakan] yang terkoordinasi antark K/L	20%	100%	

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
			% penyelesaian kajian daya dukung 4 pulau besar yang terkoordinasi antar K/L	0	100%	
			% penyelesaian kajian penyimpangan pemanfaatan ruang dan dampaknya terhadap lingkungan kerusakan dan bencana [dari 20 lokasi yang direncanakan] dan didiseminasi kepada K/L dan daerah terkait	0	100%	
			% penerapan instrumen daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dalam perencanaan ruang dan evaluasi pemanfaatan ruang di kabupaten dan propinsi [dari 11 kabupaten dan 4 propinsi yang direncanakan] yang terkoordinasi antar K/L dan daerah	6,7%	100%	
			% penerapan instrumen daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup di wilayah ekoregion yang terkoordinasi antar K/L dan daerah	0	100%	
			Jumlah propinsi dilaksanakannya pengawasan dan evaluasi pemanfaatan ruang dan alih fungsi lahan/ruang dan pelaksanaan instrumen pengawasan pemanfaatan ruang di kawasan lahan gambut, hutan dan DAS prioritas untuk menunjang pencapaian Prioritas Nasional 9 RPJMN 2010-2014	2	33	
			% PPLHD yang ditingkatkan kapasitasnya dalam pengawasan pemanfaatan ruang [dari 250 orang PPLHD yang direncanakan]	10%	100%	
4	Pengendalian Pencemaran Air	Menurunnya beban pencemar air dari industri yang dipantau dan diawasi	Jumlah industri pertambangan, energi dan migas yang dipantau dan diawasi	200	220	142,0
			Jumlah agroindustri yang dipantau dan diawasi	220	245	
			Jumlah industri manufaktur yang dipantau dan diawasi	260	330	
			Jumlah industri yang taat terhadap peraturan LH	480	720	
			Jumlah izin pembuangan air limbah ke laut yang dikeluarkan	20	100 ^{K)}	
			Jumlah pedoman teknis/peraturan perundang-undangan	2	26 ^{K)}	

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
5	Pengendalian Pencemaran Udara	Menurunnya beban pencemar udara dari industri yang dipantau dan diawasi	Jumlah industri pertambangan, energi dan migas yang dipantau dan diawasi	200	220	120,8
			Jumlah agroindustri yang dipantau dan diawasi	220	245	
			Jumlah industri manufaktur yang dipantau dan diawasi	260	330	
			Jumlah industri yang taat terhadap peraturan LH	480	720	
			Jumlah penurunan beban pencemar udara dari industri yang dipantau dan diawasi	2,5%	12,5% ^{KJ}	
			Jumlah pedoman teknis/peraturan perundang-undangan	2	26 ^{KJ}	
6	Pengendalian Pencemaran Udara Dari Emisi dan Kebisingan Kendaraan Bermotor	Menurunnya emisi dan kebisingan dari kendaraan di prioritas kota-kota yang dipantau	Jumlah peraturan perundangan yang ditetapkan	2	37 ^{KJ}	104,8
			Jumlah daerah (provinsi/kota) yang difasilitasi dalam penyusunan Peraturan Daerah tentang pengendalian pencemaran udara khususnya sumber bergerak	4	36 ^{KJ}	
			Jumlah kota yang difasilitasi dalam penerapan pemeriksaan emisi dan perawatan kendaraan bermotor (P&P)	4	36 ^{KJ}	
			Jumlah kebijakan sektor yang difasilitasi dalam mendukung reduksi emisi (penetapan standar emisi dan kebisingan, bahan bakar, manajemen transportasi, kendaraan tidak bermotor (NMT), uji emisi bagi kendaraan pribadi, <i>land use planning</i>)	2	10 ^{KJ}	
			Jumlah kota yang dievaluasi kualitas udaranya	16	36	
			Jumlah pembinaan teknis dalam pengendalian pencemaran sumber bergerak	5	25 ^{KJ}	
7	Pengelolaan B3 dan Limbah B3 Kegiatan Pertambangan, Energi, Minyak dan Gas	Meningkatnya kebijakan dan pnaatan pengelolaan B3 dan limbah B3 serta meningkatnya jumlah limbah B3 yang dikelola dalam kegiatan pertambangan, energi, minyak dan gas	Jumlah produk perumusan kebijakan dan/atau standar dan/atau pedoman pengelolaan Bahan, Berbahaya dan Beracun (B3) & limbah B3 kegiatan pertambangan, energi, minyak dan gas [Draft Permen LH]	1	5 ^{KJ}	106,0

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
			Jumlah kegiatan pemantauan dan/atau analisis dan/ atau evaluasi pelaksanaan kebijakan pengelolaan B3 & limbah B3 kegiatan pertambangan, energi, minyak dan gas	1	5 ^{KJ}	
			Jumlah perusahaan yang mendapat pengawasan kinerja penataan pengelolaan B3 & limbah B3 kegiatan pertambangan, energi, minyak dan gas	200	220	
			Jumlah daerah dan/ atau perusahaan yang mendapat bimbingan teknis pengelolaan B3 & limbah B3 kegiatan pertambangan, energi, minyak dan gas	5	10	
			Jumlah lingkup kegiatan dari seluruh ketentuan konvensi internasional pengelolaan B3 dan Limbah B3 yang ada	3	19 ^{KJ}	
8	Pengelolaan B3 dan Limbah B3 Manufaktur, Agroindustri dan Jasa	Meningkatnya kebijakan dan pertimbangan teknis dalam pengawasan penataan pengelolaan limbah B3 serta meningkatnya jumlah limbah B3 yang dikelola dalam kegiatan manufaktur, agroindustri dan jasa	Jumlah kebijakan, pedoman teknis yang diterapkan dalam Pengelolaan Limbah B3 pada kegiatan manufaktur dan agroindustri [dalam bentuk pedoman]	2	10 ^{KJ}	107,8
			Jumlah pengawasan kinerja industri yang dilakukan pembinaan dan pengawasan	480	575	
			Jumlah daerah dan/ atau perusahaan yang mendapat bimbingan teknis pengelolaan B3 & limbah B3 kegiatan manufaktur agroindustri dan jasa	5	45 ^{KJ}	
			Jumlah lingkup kegiatan dalam pelaksanaan ketentuan konvensi internasional pengelolaan B3 dan Limbah B3 (dari seluruh ketentuan Internasional yang ada)	4	20 ^{KJ}	
9	Administrasi Pengelolaan B3 dan Limbah B3	Meningkatnya penataan pengelolaan bahan dan limbah B3	Jumlah kebijakan/ pedoman/ standar/ data base yang dihasilkan dalam rangka kegiatan administrasi pengelolaan B3 & limbah B3 [Permen LH dan pedoman]	2	14 ^{KJ}	88,8

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
			Jumlah registrasi B3 dan rekomendasi, ijin dan notifikasi pengelolaan limbah B3	1.000	5.000 ^{KJ}	
			Jumlah provinsi yang mendapat bimbingan teknis administrasi pengelolaan B3 & limbah B3	5	33	
			Jumlah kegiatan dalam pelaksanaan ketentuan konvensi internasional pengelolaan B3 dan Limbah B3 (dari seluruh ketentuan internasional yang ada)	4	20 ^{KJ}	
10	Penanganan Kasus Lingkungan	Meningkatnya kualitas penanganan kasus lingkungan	% pengaduan masyarakat yang dikelola melalui penerimaan, penelaahan dan klasifikasi, penerusan kepada pihak terkait yang berwenang, atau ditangani langsung	100%	100%	89,7
			% dugaan tindak pidana LH yang ditindaklanjuti melalui proses penyelidikan dan penyidikan (pulbaket) sampai proses pengadilan [perkiraan 100 kasus per tahun]	80%	100%	
			% penanganan kasus perdata LH yang ditindaklanjuti secara perdata di dalam maupun di luar pengadilan [perkiraan 100 kasus per tahun]	80%	100%	
			Jumlah kasus lingkungan yang terevaluasi dan tereksaminasi	2	18 ^{KJ}	
11	Peningkatan Instrumen Ekonomi dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup	Meningkatkan kualitas kebijakan insentif dan pendanaan lingkungan dalam pengelolaan lingkungan hidup	% telaahan teknis diterima menjadi rekomendasi teknis insentif untuk peningkatan pengelolaan LH (90-100 proposal UMKM yang diajukan per tahun)	80%	80%	96,5
			%jumlah UMKM yang melaksanakan peningkatan kualitas LH dengan kebijakan insentif melalui K/L atau Pemda terkait	80%	80%	
			% Jumlah pemantauan terhadap UMKM yang telah mendapat insentif	80%	80%	
			Jumlah pedoman dan fasilitas teknis yang terkait dengan valuasi ekonomi SDA dan LH	5	28 ^{KJ}	
			Jumlah dokumen tentang bahan rumusan kebijakan insentif dan pendanaan lingkungan terpadu (lintas K/L)	4	20 ^{KJ}	
			Bimbingan teknis pengembangan instrumen ekonomi dan perhitungan PDRB Hijau di daerah terpilih (lintas K/L)	100%	100%	

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
12	Pengendalian Pencemaran Limbah Domestik	Meningkatnya kinerja pengelolaan limbah domestik (sampah) di kota-kota yang dipantau	Jumlah kota metropolitan dan besar yang dipantau	27	27	91,1
			Jumlah ibukota provinsi yang dipantau	20	20	
			Jumlah penurunan beban pencemar dari sumber limbah cair domestik dari kegiatan apartemen dan perumahan mewah di 3 propinsi (Banten, DKI Jakarta, dan Jawa Barat)	10%	10%	
			Jumlah pedoman teknis di bidang pengelolaan limbah domestik	2	10 ^{KJ}	
			% capaian peningkatan kinerja pengelolaan sampah melalui pengawasan	50%	75%	
13	Pengendalian Pencemaran Limbah Usaha Skala Kecil	Meningkatnya pengelolaan usaha skala kecil	Jumlah pedoman teknis di bidang pengendalian pencemaran limbah usaha skala kecil	1	5 ^{KJ}	74,0
			Jumlah sentra usaha skala kecil yang dibina	3	39 ^{KJ}	
			Jumlah penurunan beban pencemar dari sentra usaha skala kecil yang dibina	80%	80%	
14	Peningkatan Konservasi Keanekaragaman Hayati	Meningkatkan kualitas kebijakan untuk menangani konservasi keanekaragaman hayati	Jumlah dokumen laporan dan rekomendasi kebijakan konservasi keanekaragaman hayati	3	15 ^{KJ}	75,8
			Jumlah rekomendasi kajian kebijakan konservasi keanekaragaman hayati diimplementasikan	1	5 ^{KJ}	
			Jumlah hasil Rekomendasi pemantauan pelaksanaan kebijakan konservasi keanekaragaman hayati yang ditindaklanjuti	1	5 ^{KJ}	
			Jumlah daerah kegiatan pemantauan pelaksanaan kegiatan konservasi keanekaragaman hayati	10	50 ^{KJ}	
			Terfasilitasinya pengembangan program Taman Keanekaragaman Hayati di beberapa daerah	2	10 ^{KJ}	

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
15	Pengembangan Kelembagaan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Meningkatnya kapasitas kelembagaan yang menangani pengelolaan lingkungan hidup daerah	% pengembangan kebijakan kelembagaan lingkungan hidup	100%	100%	67,7
			% pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang LH di daerah provinsi setiap tahun	33	33	
			% terlaksananya monev dan Pembinaan Penerapan SPM bidang LH terhadap pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota di lembaga LH daerah provinsi setiap tahun	33	33	
			% terlaksananya Kerja Sama Antar Daerah (KSAD) dalam PLH (sampai keluarnya MoU dalam pengelolaan LH di daerah di 10 daerah provinsi dan daerah kab/kota	20%	100%	
			Updating basis data peta kelembagaan lingkungan hidup daerah untuk 520 lembaga LH kab/kota, 33 provinsi setiap tahun	100%	100%	
			Diterapkannya pedoman monitoring dan evaluasi kapasitas kelembagaan LH daerah di 520 Kabupaten/Kota setiap tahun	5%	75% ^{K)}	
			Pembinaan revitalisasi kelembagaan lingkungan hidup daerah dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) bidang lingkungan hidup di 33 provinsi setiap tahun	100%	100%	
16	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup	Meningkatnya kualitas kebijakan, partisipasi masyarakat dan lembaga kemasyarakatan yang terlibat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Terbentuknya kelompok masyarakat dan lembaga kemasyarakatan (EPW, Kaukus, Ormas, OKP, Profesi/Asosiasi, pengembangan perumahan yang berwawasan lingkungan dan CSR bidang lingkungan) yang berpartisipasi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	45	246 ^{K)}	70,3
			Meningkatnya keterlibatan jumlah kelompok masyarakat dan lembaga kemasyarakatan (EPW, Kaukus, Ormas, OKP, Profesi/Asosiasi, pengembangan perumahan yang berwawasan lingkungan dan CSR bidang lingkungan) dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di daerah	35	195 ^{K)}	

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
			Jumlah kelompok masyarakat bersama dengan Pemda yang terlibat dalam melaksanakan kegiatan 3 R (<i>Reduce, Reuse, Recycle</i>)		200 ^{KJ}	
17	Peningkatan Data, Informasi dan Infrastruktur Sistem Informasi Lingkungan Hidup	Tersedianya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dalam skala provinsi dan kabupaten/kota, dan meningkatnya kualitas data, informasi, dan sistem informasi pengelolaan lingkungan hidup	% provinsi yang menyusun SLHD dari 33 Provinsi yang direncanakan	55%	100%	77,7
			% kabupaten/kota yang menyusun SLHD dari 456 Kabupaten/Kota yang direncanakan	35%	100%	
			% jenis data sektor terkait tingkat pusat yang terkumpul dari 80 jenis data sektor yang direncanakan	60%	100%	
			Jumlah kajian informasi yang diimplementasikan dalam kebijakan di bidang lingkungan hidup per tahun	4	20 ^{KJ}	
			Jumlah aplikasi <i>e-gov</i> di bidang lingkungan hidup	2	30 ^{KJ}	
18	Peningkatan Sarana Teknis Pengendalian Dampak Lingkungan	Meningkatnya kualitas pemantauan lingkungan yg didukung dgn Sarana Pengendalian Teknis Dampak Lingkungan yg berkualitas	% jumlah data pemantauan kualitas lingkungan (air, udara, tanah, kebisingan, deposisi asam, POP's, biologi)	30%	70%	117,3
			% jumlah laboratorium pengujian parameter kualitas lingkungan yang dibina sesuai dengan peraturan yang berlaku	30%	70%	
			% jumlah pelatihan/ workshop/ seminar/ lokakarya yang diikuti oleh personil Pusarpedal	30%	70%	
			% jumlah sarana dan prasarana teknis Pusarpedal yang memenuhi kelayakan sesuai peraturan yang berlaku	30%	70%	
			% jumlah metode pengujian parameter kualitas lingkungan yg dikaji	30%	70%	
			% jumlah baku mutu lingkungan yang dikaji	10%	50%	

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
19	Perlindungan Atmosfir dan Pengendalian Dampak Perubahan Iklim	Tersedianya perangkat kebijakan dan terlaksananya kegiatan untuk melindungi fungsi atmosfer & mengendalikan dampak perubahan iklim	Jumlah konsep kebijakan di bidang perlindungan atmosfer dan pengendalian dampak perubahan iklim	3	17 ^{KI}	112,1
			% penyiapan penyusunan perangkat untuk sektor yang akan mendapatkan bimbingan teknis untuk melakukan inventori GRK & BPO	100%	100%	
			Jumlah sektor yang mendapatkan bimbingan teknis untuk melakukan inventori GRK & BPO	-	6	
			% penetapan baseline untuk pengurangan konsumsi Bahan Perusak Ozon (BPO) - HCFC	100%	100%	
			% pengurangan konsumsi Bahan Perusak Ozon (BPO) - HCFC	-	10%	
			Jumlah pemerintah daerah provinsi yang dilakukan pembinaan teknis untuk kajian kerentanan dan adaptasi perubahan iklim	3	11	
			Jumlah sektor dan daerah yang mendapatkan bimbingan teknis untuk melakukan kegiatan perlindungan atmosfer dan pengendalian dampak perubahan iklim	5	50 ^{KI}	
20	Peningkatan Konservasi dan Pengendalian Kerusakan Ekosistem Pesisir dan Laut	Meningkatnya kualitas kebijakan konservasi dan pengendalian kerusakan ekosistem pesisir dan laut	Implementasi konsep Program Kampung Iklim	2	22 ^{KI}	75,9
			Jumlah kajian, rekomendasi, dan kebijakan peningkatan konservasi dan pengendalian kerusakan pesisir dan laut yang ditetapkan (per tahun)	3	19 ^{KI}	
			% capaian inventarisasi data kerusakan ekosistem pesisir dan laut dengan basis jumlah kabupaten yang memiliki pesisir [akumulatif]	10%	50%	
			Jumlah daerah yang diverifikasi tingkat kerusakan ekosistem dan kualitas lingkungan (per tahun)	5	41 ^{KI}	
24	Pemulihan dan Penanganan Media Lingkungan (Lahan, Pesisir dan Perairan) Tercemar Limbah B3	Meningkatnya kebijakan, pertimbangan teknis dan pengawasan penataan pelaksanaan pengelolaan limbah B3 dalam rangka pemulihan kualitas media lingkungan akibat pencemaran limbah B3	Jumlah model implementasi kebijakan di regional	5	25 ^{KI}	58,2
			Jumlah kebijakan/ pedoman/ standar yang dihasilkan dalam rangka pemulihan kualitas media lingkungan tercemar limbah B3 [draft kebijakan]	3	7 ^{KI}	
			Jumlah lokasi pemantauan media lingkungan tercemar limbah B3 [status rencana pemulihan]	30	30	
			Jumlah lokasi pengawasan pengelolaan limbah di pelabuhan (umum dan khusus)	5	25 ^{KI}	
			Jumlah pengawasan kegiatan pemulihan kualitas media lingkungan [status penanganan media lingkungan tercemar limbah B3]	8	50 ^{KI}	

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
			Jumlah pelaksanaan sistem tanggap darurat pengelolaan B3 dan limbah B3 [draft Permen LH]	1	5 ^K	
			Jumlah lingkup kegiatan dalam pelaksanaan ketentuan konvensi internasional pengelolaan B3 dan limbah B3 (dari seluruh ketentuan Internasional yang ada)	3	15 ^K	
			Jumlah publikasi/modul informasi pengelolaan B3 dan limbah B3	2	10 ^K	
27	Peningkatan Kapasitas Penegakan Hukum Lingkungan	Meningkatnya kapasitas aparat penegak hukum lingkungan	Jumlah hakim lingkungan yang meningkat kapasitasnya (<i>green bench</i>)	150	550 ^K	59,8
			Jumlah kepolisian lingkungan yang meningkat kapasitasnya	66	330 ^K	
			Jumlah penyidik PPNS yang meningkat kapasitasnya	100	1800 ^K	
			Jumlah JPU yang meningkat kapasitasnya	66	432 ^K	
			Jumlah litigator yang meningkat kapasitasnya	5	245 ^K	
			Jumlah SDM pengelola pengaduan yang meningkat kapasitasnya	50	1450 ^K	
			Jumlah mediator, arbiter, pihak ketiga yang meningkat kapasitasnya	99	1499 ^K	
			Teroptimisasi PPNS dan PPLH di regional	5	25 ^K	
			Terlaksananya koordinasi nasional dan regional di bidang penegakan hukum lingkungan	6	30 ^K	
II.	PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN NEGARA LINGKUNGAN HIDUP					1.265,0
III.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR NEGARA KEMENTERIAN NEGARA LINGKUNGAN HIDUP					37,0
TOTAL ALOKASI KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP 2010-2014						4.035,8

K : Angka kumulatif 5 tahun (2010-2014)

**RENCANA TINDAK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH 2010-2014
PER KEMENTERIAN/LEMBAGA**

KEMENTERIAN/LEMBAGA: KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM

No	PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
1.	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Lainnya					1.619,9
2.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KUKM					48,0
3.	Pemberdayaan Koperasi dan UMKM	Meningkatnya kinerja kelembagaan dan usaha koperasi dan UMKM	a. Produktivitas UMKM; b. SumbanganUMKM dalam pembentukan PDB; c. Nilai ekspor produk UMKM; d. Nilai investasi UMKM; e. Jumlah koperasi aktif; f. Jumlah koperasi aktif yang melaksanakan RAT; g. Volume usaha koperasi.	Peningkatan 5 % Peningkatan 6 % Peningkatan 15 % Peningkatan 25% Proporsi 70 % dari total jumlah koperasi Proporsi 45 % dari koperasi aktif Peningkatan 20 %	Peningkatan 5 % Peningkatan 6 % Peningkatan 15 % Peningkatan 25% Proporsi 80 % dari total jumlah koperasi Proporsi 55 % dari koperasi aktif Peningkatan 20 %	2.480,2

KEMENTERIAN/LEMBAGA: KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM

No	PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
a.	Penataan peraturan perundang-undangan terkait perkoperasian, lembaga keuangan mikro (LKM), pendaftaran dan perijinan usaha, lokasi usaha, penggunaan produksi dalam negeri, dan penyebaran teknologi tepat guna, beserta ketentuan pelaksanaannya.	Peraturan perundang-undangan dan ketentuan pelaksanaan terkait koperasi, UMKM dan sistem pendukungnya yang diterbitkan/disempurnakan.	Jenis peraturan perundang-undangan yang terkait koperasi, UMKM dan sistem pendukungnya yang disepakati untuk disusun, diperbaiki, ditetapkan dan dijabarkan dalam ketentuan pelaksanaannya.	RUU Koperasi; Materi RUU LKM; RPP-UU No. 20/2008; PP-Pengganti PP 9/ 95; Perpres Lembaga Pengembangan dan Pengawasan KSP/ KJKS; Perpres Lembaga Pengembangan dan Pengawasan KSP/ KJKS; Perpres Lembaga APEX; Peraturan Teknis	UU Koperasi; UU LKM; PP untuk UU No. 20/2008; PP-Pengganti PP 9/ 95; Perpres Lembaga Pengembangan dan Pengawasan KSP/ KJKS; Perpres Lembaga APEX; RPP-UU Koperasi; RPP-UU LKM; Peraturan Teknis	39,5
b.	Peninjauan dan penghapusan berbagai pungutan dan regulasi yang merugikan koperasi dan UMKM, baik yang sektoral maupun spesifik daerah.	Terselenggaranya peninjauan pungutan yang merugikan koperasi dan UMKM, baik sektoral maupun spesifik daerah.	Laporan yang berisikan sejumlah rekomendasi penghapusan pungutan yang merugikan koperasi dan UMKM, baik sektoral maupun spesifik daerah.	40 Regulasi	200 Regulasi	7,5

KEMENTERIAN/LEMBAGA: KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM

No	PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
c.	Pembentukan Forum Koordinasi Pemberdayaan Koperasi dan UMKM.	Berfungsinya Forum Koordinasi Pemberdayaan koperasi dan UMKM.	Terbitnya landasan hukum.	Konsep struktur dan fungsi Forum Koordinasi Pemberdayaan Koperasi dan UKM	Forum Koordinasi Pemberdayaan Koperasi dan UKM ^{KJ}	2,3
d.	Perluasan pelayanan kredit/ pembiayaan bank bagi koperasi dan UMKM, yang didukung pengembangan sinergi dan kerja sama dengan lembaga keuangan/ pembiayaan lainnya.	Meningkatnya jangkauan pelayanan kredit/ pembiayaan bank bagi koperasi dan UMKM.	a. Kerja sama pembiayaan yang melibatkan bank dan lembaga keuangan/ pembiayaan lainnya.	5 <i>Memorandum of Understanding</i> (MOU)	25 MOU ^{KJ}	8,2
			b. Terfasilitasinya Lembaga Penjaminan Kredit Daerah (LPKD) yang melakukan <i>co-guarantee</i> dengan lembaga penjaminan nasional.	8 Propinsi	33 Propinsi ^{KJ}	15,7
			c. Jumlah Koperasi yang dapat mengakses kredit/ pembiayaan bank melalui <i>linkage</i> .	100	500 ^{KJ}	1,8
			d. Jumlah LKM (koperasi dan BPR) yang melakukan kerjasama pembiayaan dengan bank.	100	500 ^{KJ}	5,0
			e . Jumlah LKPD	2	12 ^{KJ}	10,0

KEMENTERIAN/LEMBAGA: KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM

No	PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
e.	Peningkatan peran lembaga keuangan bukan bank, seperti Koperasi Simpan Pinjam (KSP)/Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS), perusahaan modal ventura, anjak piutang, sewa guna usaha, dan pegadaian, dalam mendukung pembiayaan bagi koperasi dan UMKM, disertai dengan pengembangan jaringan informasinya.	Meningkatnya kapasitas dan jangkauan lembaga keuangan bukan bank untuk menyediakan pembiayaan usaha bagi koperasi dan UMKM.	Jumlah lembaga pembiayaan bukan bank yang dibentuk.	100 KSP/KJKS	500 KSP/KJKS ^{KJ}	13,1
				1 Lembaga Modal Ventura Daerah (LMVD)	5 LMVD	
f.	Peningkatan kapasitas kelembagaan dan kualitas layanan lembaga keuangan mikro (LKM), termasuk untuk akreditasi dan sertifikasi pelayanan LKM, termasuk LKM yang berbadan hukum koperasi.	a. Meningkatnya kapasitas kelembagaan LKM.	Jumlah LKM yang terdaftar dan terakreditasi sesuai ketentuan hukum tentang LKM.	100 LKM	500 LKM ^{KJ}	2,5
		b. Meningkatnya kapasitas dan kualitas layanan LKM.	Jumlah pengelola LKM yang mengikuti pelatihan.	-	4.000 pengelola LKM ^{KJ}	4,0
			Jumlah sumber daya manusia (SDM) pengelola KSP/KJKS yang bersertifikat.	1.200 orang	6.000 Org ^{KJ}	5,0
			Jumlah lembaga pendidikan dan pelatihan (diklat) profesi (LDP) KJK dan tempat uji kompetensi (TUK) yang diperkuat.	-	8 Unit ^{KJ}	6,0
			Jumlah manajer/kepala cabang KJK yang diikutkan diklat dan sertifikasi kompetensi LKM.	900 orang	4.500 orang ^{KJ}	5,0

KEMENTERIAN/LEMBAGA: KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM

No	PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
g.	Penyediaan sistem insentif dan pembinaan bagi UMKM yang berbasis inovasi dan berorientasi ekspor.	a. Tersedianya sistem insentif bagi UMKM yang berbasis inovasi dan berorientasi ekspor.	Jenis dan jangkauan sistem insentif bagi UMKM yang berbasis inovasi dan berorientasi ekspor.	Insentif dukungan pemasaran, subsidi bunga dan peningkatan kapasitas SDM di 5 provinsi.	Insentif dukungan pemasaran, subsidi bunga dan peningkatan kapasitas SDM di 25 provinsi	5,0
				-	Pelatihan 800 orang terkait manajemen ekspor, ISO, mutu	4,0
		b. Terfasilitasinya KUKM potensial mengikuti pameran di luar negeri.	Pengembangan/perluasan pasar ekspor produk KUKM melalui pameran di luar negeri.	140 KUKM	700 KUKM	42,5
		c. Terfasilitasinya KUKM dalam Pengembangan desain produk.	Pengembangan daya saing pemasaran Industri Kreatif KUKM potensial/ ekspor.	160 KUKM	800 KUKM	7,0
		d. Terwujudnya peningkatan kemampuan berinovasi UMKM dalam pengembangan desain produk UMKM serta memasarkannya.	Peningkatan daya saing dan pemasaran produk kriya KUMKM.	100 KUKM	500 KUKM	5,0
		e. Meningkatnya akses pasar produk KUMKM.	Meningkatnya daya saing dan identitas produk UMKM dibidang makanan dan minuman.	200 KUKM	1.000 KUKM	7,0
		f. Berkembangnya komoditas unggulan daerah melalui pendekatan <i>One Village One Product</i> (OVOP) di beberapa propinsi.	Meningkatnya budidaya, pengolahan/ industri, pemasaran dan sarana penunjang (modal, pendampingan, teknologi dll.).	4 Lokasi	20 Lokasi	10,0

KEMENTERIAN/LEMBAGA: KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM

No	PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
h.	Pengembangan dan penguatan sentra-sentra produksi/ klaster usaha skala mikro dan kecil, terutama di daerah tertinggal dan terisolir.	a. Meningkatkan peran koperasi dalam pengembangan dan pengelolaan pasar.	Pengembangan sarana pemasaran di daerah tertinggal/perbatasan.	100 UMi	500 UMi ^{KJ}	11,3
		b. Terfasilitasinya sarana usaha pedagang kaki lima (PKL) yang memiliki koperasi/ kelompok.	Tertatanya sarana usaha PKL dan terbangunnya sarana pemasaran produk KUKM.	150 UMi 5 koperasi	2.150 UMi, 5 koperasi ^{KJ}	34,2
		c. Meningkatkan kapasitas produksi sentra UMKM.	Bantuan sarana usaha produksi melalui koperasi	60 koperasi	300 koperasi ^{KJ}	175,0
		d. Tersedianya dukungan penguatan sentra-sentra produksi/ klaster usaha mikro dan kecil terutama di daerah tertinggal dan terisolir.	Jumlah usaha skala mikro dan kecil yang difasilitasi bantuan usahanya, pengenalan teknologi tepat guna, dan replikasi model teknologi tepat guna.	25 koperasi 300 UMi 180 UKM	125 koperasi ^{KJ} 1.500 UMi 900 UKM	19,5
i.	Dukungan pengembangan kemitraan yang melibatkan koperasi dan UMKM dalam pengembangan produk-produk unggulan yang berbasis rantai nilai, subkontrak, alih teknologi, pemasaran/ ekspor, atau investasi.	a. Terfasilitasinya pembentukan jaringan usaha melalui koperasi.	Pengembangan jaringan usaha melalui koperasi.	300 KUMKM	1.500 KUMKM ^{KJ}	5,0
		b. Terfasilitasinya kemitraan pemasaran eko-produk KUMKM.	Pengembangan kemitraan eko-produk KUMKM.	100 KUMKM	500 KUMKM ^{KJ}	5,0
		c. Meningkatnya jumlah KUMKM yang bermitra di sektor pariwisata.	Kemitraan KUMKM di sektor pariwisata.	300 KUMKM	1.500 KUMKM ^{KJ}	6,4
		d. Terfasilitasinya kemitraan pola waralaba di kalangan KUMKM.	Kemitraan waralaba.	100 KUMKM	500 KUMKM ^{KJ}	3,0
		e. Terfasilitasinya kemitraan pemasaran produk energi biomassa KUMKM.	Kemitraan pemasaran produk energi biomassa.	110 KUMKM	550 KUMKM ^{KJ}	1,5
		f. Terfasilitasinya kemitraan KUMKM dengan BUMN.	Kemitraan KUMKM dengan BUMN.	200 KUMKM	1.000 KUMKM ^{KJ}	3,0

KEMENTERIAN/LEMBAGA: KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM

No	PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
		g. Meningkatnya mutu dan desain kemasan produk KUKM.	Pengembangan kemasan produk KUKM.	500 KUKM	2.500 KUKM ^{KJ}	11,3
		h. Terfasilitasinya kemitraan pola subkontrak di kalangan KUMKM.	Pengembangan kemitraan pola subkontrak.	-	400 KUMKM ^{KJ}	2,1
		i. Terwujudnya kemitraan yang saling menguntungkan antara koperasi dengan peritel modern.	Pengembangan jaringan dengan bisnis ritel modern (SME'sCo mart).	200 KUMKM	1.000 KUMKM ^{KJ}	10,0
		j. Tercapainya peningkatan produktivitas UMKM.	Peningkatan produktivitas usaha mikro melalui klinik bisnis.	150 UMI	750 KUMKM ^{KJ}	13,8
j.	Dukungan pemasaran produk dan jasa koperasi dan UMKM melalui pengembangan dan penguatan kelembagaan, informasi pasar dan jaringan pemasaran baik domestik maupun ekspor.	a. Tersedianya <i>trading house</i> bagi KUMKM.	Pengembangan <i>trading house</i> bagi KUMKM dalam rangka mengoptimalkan ekspansi pemasaran dan promosi produk KUMKM ke dalam maupun luar negeri, khususnya di Timur Tengah.	10 Unit	50 Unit ^{KJ}	5,0
		b. Terpromosinya KUKM yang memiliki produk berkualitas.	Penyelenggaraan Smesco Festival	500 KUKM	500 KUKM ^{KJ}	20,0
		c. Tersedianya dukungan pemasaran bagi usaha mikro.	Peningkatan akses produk usaha mikro melalui pasar rakyat	1.000 Umi	5.000 UMi ^{KJ}	27,5
		d. Terwujudnya pengelolaan manajemen pasar tradisional oleh Koperasi.	Pengembangan pengelolaan manajemen pasar tradisional.	-	4 paket ^{KJ}	1,2
		e. Pengembangan Pusat Promosi KUKM.	Pusat Promosi KUKM.	5 lokasi	25 lokasi ^{KJ}	2,5
		f. Peningkatan fungsi dan kualitas sarana dan prasarana pasar tradisional.	Pengembangan pasar tradisional melalui koperasi.	200 UMi	1.000 UMi ^{KJ}	20,0
		g. Tersebar informasi produk-produk KUKM yang berkualitas.	Terselenggaranya pameran produk-produk KUKM yang berkualitas.	720 KUKM	3.600 KUKM ^{KJ}	59,8
		h. Meningkatnya akses pasar produk KUKM melalui penyediaan sarana prasarana pemasaran.	Penyediaan fasilitas sarana prasarana pemasaran produk KUKM.	255 KUKM	1.275 KUKM ^{KJ}	17,5

KEMENTERIAN/LEMBAGA: KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM

No	PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
k.	Penyusunan <i>blueprint</i> pengembangan kewirausahaan nasional yang didukung pembenahan pranata kelembagaan	a. Tersusunnya <i>blueprint</i> pengembangan kewirausahaan nasional.	Dokumen <i>blueprint</i> pengembangan kewirausahaan nasional disusun.	Kajian <i>blueprint</i> pengembangan kewirausahaan nasional selesai.	Dokumen <i>blueprint</i> pengembangan kewirausahaan ditetapkan, dan pemyarakatannya. ^{KJ}	4,0
		b. Diperbaikinya pranata kelembagaan pengembangan kewirausahaan, terutama dalam aspek regulasi dan kurikulum pendidikan dan pelatihan kewirausahaan sesuai dengan <i>blueprint</i> pengembangan kewirausahaan.	a. Regulasi dan pranata kelembagaan pengembangan kewirausahaan nasional yang diselaraskan dengan dokumen <i>blueprint</i> .	-	Gerakan Kewirausahaan Nasional dan kelembagaan pendukung ^{KJ}	3,0
			b. Kurikulum dan modul pendidikan dan pelatihan kewirausahaan khususnya untuk pengusaha skala mikro, kecil dan menengah, serta pengelola koperasi diperbaiki dan diterapkan.	-	Kurikulum dan modul diklat kewirausahaan bagi pengusaha skala mikro, kecil dan menengah, serta pengelola koperasi diterapkan. ^{KJ}	5,0
l.	Peningkatan kompetensi pengusaha skala mikro, kecil dan menengah serta pengelola koperasi.	Meningkatnya kompetensi pengusaha skala mikro, kecil dan menengah serta pengelola koperasi.	a. Sistem standarisasi dan sertifikasi kompetensi SDM Koperasi dan UKM.	-	Sistem standarisasi dan sertifikasi SDM koperasi dan UKM dan pemyarakatannya. ^{KJ}	4,0
			b. Jumlah pengusaha skala mikro, kecil dan menengah serta pengelola koperasi yang mengikuti diklat keterampilan teknis dan manajerial.	450 pengusaha skala mikro, kecil dan menengah serta pengelola koperasi	2.250 pengusaha skala mikro, kecil dan menengah serta pengelola koperasi ^{KJ}	2,5
			c. Jumlah modul diklat dan pendidikan <i>vocational</i> .	5 Modul	25 Modul ^{KJ}	2,5
			d. Jumlah peserta yang mengikuti diklat <i>vocational</i> .	1.000 orang	5.000 orang ^{KJ}	25,0

KEMENTERIAN/LEMBAGA: KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM

No	PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
m.	Revitalisasi dan pengembangan lembaga pendidikan dan pelatihan koperasi dan UMKM.	Terlaksananya revitalisasi dan pengembangan lembaga pendidikan dan pelatihan koperasi dan UMKM.	a. Pedoman revitalisasi lembaga diklat KUMKM.	-	Pedoman standarisasi diklat KUMKM ^{KJ}	2,9
			b. Jumlah tenaga pengelola dan instruktur pada lembaga diklat yang dilatih.	120 orang	600 orang ^{KJ}	3,0
n.	Revitalisasi sistem pendidikan, pelatihan dan penyuluhan perkoperasian bagi anggota dan pengelola koperasi, serta calon anggota dan kader koperasi.	Sistem pendidikan, pelatihan dan penyuluhan perkoperasian bagi anggota dan pengelola koperasi, serta calon anggota dan kader koperasi semakin efektif.	a. Jumlah peserta peningkatan pemahaman koperasi di kalangan masyarakat kelompok strategis.	1.000 orang	5.000 orang ^{KJ}	2,5
			b. Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan peningkatan pemahaman koperasi pada SDM koperasi.	-	7.000 orang ^{KJ}	6,0
o.	Peningkatan kemampuan pembina koperasi.	Meningkatnya kemampuan pembina koperasi.	a. Materi kurikulum dan diklat pembina koperasi.	Penyempurnaan kurikulum diklat pembina koperasi	Kurikulum diklat pembina koperasi dan penerapannya. ^{KJ}	2,9
			b. Jumlah pembina koperasi yang mengikuti diklat.	-	2.400 orang ^{KJ}	2,0
p.	Penyuluhan perkoperasian kepada masyarakat luas yang disertai dengan pemasyarakatan contoh-contoh koperasi sukses yang dikelola sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip koperasi yang baik.	Terselenggaranya penyuluhan perkoperasian yang menjangkau masyarakat luas dan disertai dengan contoh-contoh terbaik praktik berkoperasi.	a. Landasan hukum bagi penyelenggaraan penyuluhan perkoperasian.	Konsep landasan hukum tentang jabatan fungsional penyuluh perkoperasian	Landasan hukum tentang jabatan fungsional penyuluh perkoperasian ^{KJ}	2,0
			b. Materi dan media penyuluhan	1 paket	5 paket ^{KJ}	5,0
			c. Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam penyuluhan perkoperasian.	120 orang di 4 propinsi	600 orang di 20 propinsi ^{KJ}	2,9
			d. Jumlah jabatan fungsional penyuluh koperasi.	-	2.400 orang ^{KJ}	4,0

KEMENTERIAN/LEMBAGA: KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM

No	PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
			e. Jumlah peserta pembinaan dan pengembangan SDM Koperasi.	-	2.400 orang ^{KJ}	2,0
q.	Peningkatan peran Pemda, BUMN dan lembaga swadaya masyarakat dalam penyediaan dukungan pembiayaan bagi koperasi dan UMKM, yang didukung penyelarasannya dengan program-program pembiayaan nasional bagi koperasi dan UMKM.	a. Meningkatnya penyediaan pembiayaan bagi koperasi dan UMKM yang didukung peran Pemda, BUMN dan lembaga swadaya masyarakat.	Meningkatnya penyediaan pembiayaan bagi koperasi dan UMKM yang didukung peran Pemda, BUMN dan lembaga swadaya masyarakat.	7 propinsi menyediakan dukungan pembiayaan KUMKM melalui dana APBD	33 propinsi menyediakan dukungan pembiayaan KUMKM melalui dana APBD ^{KJ}	5,0
			Jumlah UMKM yang diseleksi untuk mendapatkan pembiayaan melalui sertifikasi tanah.	-	80.000 UMKM ^{KJ}	14,0
			Jumlah UMKM yang dibina setelah mendapatkan sertifikasi tanah.	20%	15%	1,5
		b. Meningkatnya Jumlah koperasi dan UMKM yang sudah memanfaatkan pembiayaan yang disediakan melalui dukungan/ program Pemda, BUMN (PKBL), <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR), dan lembaga swadaya masyarakat.	Jumlah koperasi dan UMKM yang sudah memanfaatkan pembiayaan yang disediakan melalui dukungan/ program Pemda, BUMN (PKBL), CSR, dan lembaga swadaya masyarakat.	50 koperasi 500 UMKM	250 koperasi ^{KJ} 2.500 UMKM	7,5
r.	Penyediaan skim-skim pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan dan kapasitas usaha mikro, seperti dana bergulir, bantuan sosial, dan tanggung renteng	Tersedianya skim-skim pembiayaan khusus yang sesuai dengan kebutuhan dan kapasitas usaha mikro.	Jenis-jenis skim pembiayaan khusus bagi usaha mikro.	5 jenis skim pembiayaan khusus bagi usaha mikro.	25 jenis skim pembiayaan khusus bagi usaha mikro. ^{KJ}	25,0
				Penyediaan bantuan dana bagi 2600 pelaku usaha mikro/koperasi	Penyediaan bantuan dana bagi 7.900 pelaku usaha mikro/koperasi ^{KJ}	395,0

KEMENTERIAN/LEMBAGA: KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM

No	PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
s.	Dukungan sistem insentif bagi penyedia jasa pendampingan dan konsultasi keuangan yang mendukung peningkatan akses koperasi dan UMKM kepada sumber-sumber pembiayaan.	Tersedianya jasa pendampingan dan konsultasi keuangan bagi koperasi dan UMKM.	Jumlah Konsultan Keuangan Mitra Bank (KKMB) yang ditingkatkan kapasitasnya.	200 orang KKMB	1.000 orang KKMB ^{KJ}	2,7
			Jumlah koperasi dan UMKM yang sudah memanfaatkan jasa pendampingan dan konsultasi keuangan, baik yang disediakan pemerintah,	-	200 koperasi ^{KJ} 2.400 UMKM	4,0
t.	Dukungan pengenalan teknologi bagi usaha skala mikro dan kecil, tidak terkecuali bagi sektor informal.	a. Tersedianya dukungan pengenalan teknologi bagi usaha skala mikro dan kecil, tidak terkecuali bagi sektor informal.	Jumlah teknologi tepat guna yang dikenalkan kepada usaha mikro dan kecil.	-	20 paket kegiatan ^{KJ}	10,0
			Jumlah usaha mikro dan kecil yang menerima dukungan teknologi tepat guna.	350 UMKM	1.750 UMKM ^{KJ}	11,8
		b. Terpromosinya KUKM yang memiliki produk berkualitas.	Pengembangan dan pelayanan bisnis KUKM melalui <i>trading board</i> .	3.000 KUKM	15.000 KUKM ^{KJ}	6,0
u.	Pemasyarakatan dan pembinaan kewirausahaan dan budaya usaha bagi masyarakat, termasuk usaha skala mikro dan kecil.	Terselenggaranya pemasyarakatan dan pembinaan kewirausahaan dan budaya usaha bagi masyarakat, termasuk usaha skala mikro dan kecil.	a. Jumlah peserta pemasyarakatan kewirausahaan.	2.000 orang	10.000 orang ^{KJ}	13,6
			b. Jumlah pelaku usaha koperasi dan UMK peserta diklat kewirausahaan	-	6.000 org ^{KJ}	8,2
v.	Dukungan pengembangan wirausaha baru melalui inkubator teknologi dan bisnis, serta pola-pola pengembangan lainnya sesuai blueprint pengembangan kewirausahaan.	a. Tersedianya dukungan pengembangan wirausaha baru melalui inkubator teknologi dan bisnis.	a. Jumlah wirausaha baru yang dikembangkan/difasilitasi melalui pola pengembangan wirausaha lainnya.	-	800 orang ^{KJ}	16,0
			b. Jumlah tempat pendidikan keterampilan usaha (TPKU) yang dibangun.	200 unit	1.000 unit ^{KJ}	100,0
			c. Jumlah calon wirausaha baru.	1.000 orang	5.000 org ^{KJ}	5,0
		b. Terfasilitasi wirausaha baru melalui pendampingan.	b. Terfasilitasi wirausaha baru melalui pendampingan.	350 KUMK	1.750 KUMK ^{KJ}	21,5
		c. Meningkatnya kemampuan usaha KUKM melalui inkubator.	Jumlah UKM <i>tenant</i> binaan inkubator yang difasilitasi.	10 Inkubator	50 Inkubator ^{KJ}	2,5

KEMENTERIAN/LEMBAGA: KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM

No	PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
w.	Peningkatan kualitas administrasi dan pengawasan pemberian badan hukum koperasi.	Kualitas administrasi dan pengawasan pemberian badan hukum koperasi semakin meningkat.	Efisiensi proses administrasi pemberian badan hukum koperasi.	30 % koperasi sudah tertata administrasi badan hukumnya	70 % koperasi sudah tertata administrasi badan hukumnya	5,5
x.	Penyediaan insentif dan fasilitasi dalam rangka pengembangan usaha dan jaringan kerja sama usaha antar koperasi, termasuk pengembangan koperasi sekunder.	Tersedianya fasilitasi bagi pengembangan jaringan kerja sama usaha antar koperasi.	Jumlah dan jangkauan fasilitasi bagi pengembangan kerja sama usaha antar koperasi.	5 model kerja sama antara koperasi sekunder dengan anggotanya; 5 fasilitasi pengembangan usaha koperasi	25 model kerja sama antara koperasi sekunder dengan anggotanya; 25 fasilitasi pengembangan usaha koperasi ^{K)}	3,7
y.	Peningkatan kapasitas kelembagaan koperasi.	Meningkatnya kapasitas dan kinerja kelembagaan koperasi	a. Jumlah kebijakan dan peserta bimbingan teknis perkoperasian.	5 kebijakan dan 200 KUMKM	25 kebijakan dan 1.000 KUMKM ^{K)}	25,0
			b. Jumlah pengembangan organisasi kantor cabang KSP/unit simpan pinjam (USP).	15 kantor cabang	75 kantor cabang ^{K)}	1,3
			c. Jumlah koperasi yang menerapkan prinsip akuntabilitas dan pengendalian koperasi.	1.500 koperasi	7.500 koperasi ^{K)}	3,5
			d. Jumlah koperasi yang diperingkat.	1.000 koperasi, dan 75 koperasi berprestasi	5.000 koperasi, dan 375 koperasi berprestasi ^{K)}	10,4
TOTAL ALOKASI KEMENTERIAN KUKM 2010-2014						4.148,1

K : Angka kumulatif 5 tahun (2010-2014)

**RENCANA TINDAK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH 2010-2014
PER KEMENTERIAN/LEMBAGA**

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO	PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)	
				2010	2014		
1	Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Meningkatnya jumlah kebijakan pelaksanaan PUG di bidang sosial, politik, dan hukum	Jumlah kebijakan, program, dan kegiatan pelaksanaan PUG di bidang sosial, politik, dan hukum di tingkat nasional dan daerah	13	18 ^{K)}	352,3	
		Meningkatnya jumlah kebijakan pelaksanaan PUG di bidang ekonomi	Jumlah kebijakan, program, dan kegiatan pelaksanaan PUG di bidang ekonomi di tingkat nasional dan daerah	15	31 ^{K)}		
		Meningkatnya jumlah kebijakan perlindungan perempuan terhadap berbagai tindak kekerasan	1. Jumlah kebijakan perlindungan perempuan terhadap berbagai tindak kekerasan	13	26 ^{K)}		
			2. Persentase cakupan perempuan korban kekerasan yang mendapat penanganan pengaduan	-	100		
1.1	Penyusunan dan harmonisasi kebijakan bidang pendidikan yang responsif gender	Meningkatnya jumlah kebijakan pelaksanaan PUG bidang pendidikan	1. Jumlah kebijakan pelaksanaan PUG dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan	2	3 ^{K)}	11,1	
			2. Jumlah K/L dan pmda yang difasilitasi dalam penerapan ARG di bidang pendidikan	K/L	1		5 ^{K)}
				prov	5		19 ^{K)}
			3. Jumlah K/L dan pmda yang difasilitasi dalam penyusunan data terpilah di bidang pendidikan	K/L	-		1
				prov	-		8 ^{K)}
4. Jumlah pedoman monev pelaksanaan PUG di bidang pendidikan dasar, menengah, tinggi, serta pendidikan budi pekerti dan karakter bangsa	1	1 ^{K)}					

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO	PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)	
				2010	2014		
1.2	Penyusunan dan harmonisasi kebijakan bidang kesehatan yang responsif gender	Meningkatnya jumlah kebijakan pelaksanaan PUG bidang kesehatan	1. Jumlah kebijakan pelaksanaan PUG di bidang kesehatan		3	4 ^{K)}	12,5
			2. Jumlah K/L dan pmda yang difasilitasi dalam penerapan ARG di bidang kesehatan	K/L	1	5 ^{K)}	
				prov	5	25 ^{K)}	
			3. Jumlah K/L dan pmda yang difasilitasi dalam penyusunan data terpilah di bidang kesehatan	K/L	-	1	
prov	1	25 ^{K)}					
1.3	Penyusunan dan harmonisasi kebijakan bidang sumber daya alam dan lingkungan yang responsif gender	Meningkatnya jumlah kebijakan pelaksanaan PUG bidang sumber daya alam dan lingkungan	1. Jumlah kebijakan pelaksanaan PUG di bidang sumber daya alam dan lingkungan		3	3 ^{K)}	12,5
			2. Jumlah K/L dan pmda yang difasilitasi dalam penerapan ARG di bidang sumber daya alam dan lingkungan	K/L	2	10 ^{K)}	
				prov	5	28 ^{K)}	
			3. Jumlah K/L dan pmda yang difasilitasi dalam penyusunan data terpilah di bidang sumber daya alam dan lingkungan	K/L	-	5	
prov	-	14 ^{K)}					
1.4	Penyusunan dan harmonisasi kebijakan partisipasi perempuan di bidang politik dan pengambilan keputusan	Meningkatnya jumlah kebijakan partisipasi perempuan di bidang politik dan pengambilan keputusan	1. Jumlah kebijakan pelaksanaan PUG di bidang politik dan pengambilan keputusan		2	5 ^{K)}	18,5
			2. Jumlah K/L dan pmda yang difasilitasi dalam penerapan ARG di bidang politik dan pengambilan keputusan	K/L	3	3	
				prov	7	33 ^{K)}	
			3. Jumlah K/L dan pmda yang difasilitasi dalam penyusunan data terpilah di bidang politik dan pengambilan keputusan	K/L	-	3	
prov	-	12 ^{K)}					
			4. Jumlah pedoman monev pelaksanaan PUG di bidang politik		1	1 ^{K)}	

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO	PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)	
				2010	2014		
1.5	Penyusunan dan harmonisasi kebijakan bidang hukum yang responsif gender	Meningkatnya jumlah kebijakan pelaksanaan PUG di bidang hukum	1. Jumlah kebijakan pelaksanaan PUG di bidang hukum		3	3 ^{K)}	36,4
			2. Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi dalam penerapan ARG di bidang hukum	K/L	1	5 ^{K)}	
				prov	8	8	
			3. Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi dalam penyusunan data terpilah di bidang hukum	K/L	2	2	
prov	7	33 ^{K)}					
1.6	Penyusunan dan harmonisasi kebijakan bidang ketenagakerjaan yang responsif gender	Meningkatnya jumlah kebijakan pelaksanaan PUG bidang ketenagakerjaan	1. Jumlah kebijakan pelaksanaan PUG di bidang ketenagakerjaan		1	3 ^{K)}	14,6
			2. Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi dalam penerapan ARG di bidang ketenagakerjaan	K/L	1	1	
				prov	5	25 ^{K)}	
			3. Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi dalam penyusunan data terpilah di bidang ketenagakerjaan	K/L	-	1	
prov	2	23 ^{K)}					
1.7	Penyusunan dan harmonisasi kebijakan koperasi, usaha mikro dan kecil, industri, dan perdagangan yang responsif gender	Meningkatnya jumlah kebijakan pelaksanaan PUG bidang koperasi, usaha mikro dan kecil, industri, dan perdagangan	1. Jumlah kebijakan pelaksanaan PUG di bidang koperasi, usaha mikro dan kecil, industri, dan perdagangan		4	4 ^{K)}	19,9
			2. Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi dalam penerapan ARG di bidang koperasi, usaha mikro dan kecil, industri, dan perdagangan	K/L	3	4	
				prov	3	22 ^{K)}	
			3. Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi dalam penyusunan data terpilah di bidang koperasi, usaha mikro dan kecil, industri, dan perdagangan	K/L	2	2	
prov	4	23 ^{K)}					

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO	PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)	
				2010	2014		
1.8	Penyusunan dan harmonisasi kebijakan bidang pertanian, kehutanan, perikanan, kelautan, ketahanan pangan, dan agrobisnis yang responsif gender	Meningkatnya jumlah kebijakan pelaksanaan PUG bidang pertanian, kehutanan, perikanan, kelautan, ketahanan pangan, dan agrobisnis	1. Jumlah kebijakan pelaksanaan PUG di bidang pertanian, kehutanan, perikanan, kelautan, ketahanan pangan, dan agrobisnis		4	10 ^{K)}	24,6
			2. Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi dalam penerapan ARG di bidang pertanian, kehutanan, perikanan, kelautan, ketahanan pangan, dan agrobisnis	K/L	3	3	
				prov	4	30 ^{K)}	
			3. Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi dalam penyusunan data terpilah di bidang pertanian, kehutanan, perikanan, kelautan, ketahanan pangan, dan agrobisnis	K/L	3	3	
				prov	4	27 ^{K)}	
			1.9	Penyusunan dan harmonisasi kebijakan bidang IPTEK dan sumber daya ekonomi yang responsif gender	Meningkatnya jumlah kebijakan pelaksanaan PUG bidang IPTEK dan sumber daya ekonomi	1. Jumlah kebijakan pelaksanaan PUG di bidang IPTEK dan sumber daya ekonomi	
2. Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi dalam penerapan ARG di bidang IPTEK dan sumber daya ekonomi	K/L	1				1	
	prov	5				25 ^{K)}	
3. Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi dalam penyusunan data terpilah di bidang IPTEK dan sumber daya ekonomi	K/L	1				1	
	prov	2				10 ^{K)}	
4. Jumlah pedoman monev pelaksanaan PUG di bidang IPTEK dan sumber daya ekonomi		1				1 ^{K)}	
1.10	Penyusunan dan harmonisasi kebijakan bidang infrastruktur yang responsif gender	Meningkatnya jumlah kebijakan pelaksanaan PUG bidang infrastruktur	1. Jumlah kebijakan pelaksanaan PUG di bidang infrastruktur		4	11 ^{K)}	16,8
			2. Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi dalam penerapan ARG di bidang infrastruktur	K/L	-	4	
				prov	-	18 ^{K)}	
			3. Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi dalam penyusunan data terpilah di bidang infrastruktur	K/L	-	1	
				prov	-	13 ^{K)}	

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO	PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)	
				2010	2014		
			4. Jumlah pedoman money pelaksanaan PUG di bidang infrastruktur	1	2 ^{K)}		
1.11	Penyusunan dan harmonisasi kebijakan perlindungan perempuan dari tindak kekerasan	Meningkatnya jumlah kebijakan perlindungan perempuan dari tindak kekerasan	1. Jumlah kebijakan perlindungan perempuan dari tindak kekerasan	5	9 ^{K)}	50,1	
			2. Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi dalam penerapan kebijakan perlindungan perempuan dari tindak kekerasan	K/L	3		3
				prov	6		33
			3. Jumlah kompilasi data perlindungan perempuan dari tindak kekerasan	prov	3		23 ^{K)}
			4. Persentase cakupan perempuan korban kekerasan yang mendapat penanganan pengaduan	-	100		
5. Persentase cakupan anak korban kekerasan yang mendapat penanganan pengaduan	-	100					
1.12	Penyusunan dan harmonisasi kebijakan penyusunan data gender	Meningkatnya jumlah kebijakan penerapan sistem data gender	1. Jumlah kebijakan penerapan sistem data gender	2	4 ^{K)}	62,4	
			2. Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi dalam penerapan kebijakan penerapan sistem data terpilah gender	K/L	1		17 ^{K)}
				prov	0		33 ^{K)}
3. Tersedianya sistem data gender	1	2 ^{K)}					
1.13	Penyusunan dan harmonisasi kebijakan perlindungan masalah sosial perempuan	Meningkatnya jumlah kebijakan perlindungan masalah sosial perempuan	1. Jumlah kebijakan perlindungan masalah sosial perempuan	3	6 ^{K)}	11,1	
			2. Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi dalam penerapan kebijakan perlindungan masalah sosial perempuan	K/L	1		5 ^{K)}
				prov	5		24 ^{K)}
			3. Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi dalam penyusunan data perlindungan masalah sosial perempuan	K/L	1		1
				prov	1		6 ^{K)}

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO	PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)	
				2010	2014		
1.14	Penyusunan dan harmonisasi kebijakan perlindungan tenaga kerja perempuan	Meningkatnya jumlah kebijakan perlindungan tenaga kerja perempuan	1. Jumlah kebijakan perlindungan tenaga kerja perempuan		1	4 ^{K)}	13,0
			2. Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi dalam penerapan kebijakan perlindungan tenaga kerja perempuan	K/L	1	1	
				prov	5	23 ^{K)}	
			3. Jumlah kompilasi data perlindungan tenaga kerja perempuan	K/L	1	1	
				prov	2	7 ^{K)}	
			1.15	Penyusunan dan harmonisasi kebijakan perlindungan korban perdagangan orang	Meningkatnya jumlah kebijakan perlindungan korban tindak pidana perdagangan orang	1. Jumlah kebijakan perlindungan korban tindak pidana perdagangan orang	
2. Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi dalam penerapan kebijakan perlindungan korban tindak pidana perdagangan orang	K/L	1				10	
	prov	5				15	
3. Jumlah kompilasi data perlindungan korban tindak pidana perdagangan orang	K/L	-				3 ^{K)}	
	prov	-				6 ^{K)}	
2.	Perlindungan Anak	1. Meningkatnya jumlah kebijakan pelaksanaan tumbuh kembang anak				Jumlah kebijakan pelaksanaan tumbuh kembang anak	
		2. Meningkatnya jumlah kebijakan pelaksanaan perlindungan anak	Jumlah kebijakan pelaksanaan perlindungan anak		9	21 ^{K)}	

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO	PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)	
				2010	2014		
2.1	Penyusunan dan harmonisasi kebijakan pemenuhan hak pendidikan anak	Meningkatnya jumlah kebijakan pemenuhan hak pendidikan anak	1. Jumlah kebijakan pemenuhan hak pendidikan anak		1	3 ^{K)}	27,5
			2. Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi dalam pemenuhan hak pendidikan anak	K/L	1	1	
				prov	5	10	
			3. Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi dalam penyusunan data pelaksanaan kebijakan pendidikan anak	K/L	1	1	
prov	1	33 ^{K)}					
2.2	Penyusunan dan harmonisasi kebijakan pemenuhan hak kesehatan anak	Meningkatnya jumlah kebijakan pemenuhan hak kesehatan anak	1. Jumlah kebijakan pemenuhan hak kesehatan anak		2	2 ^{K)}	19,1
			2. Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi dalam pemenuhan hak kesehatan anak	K/L	1	2	
				prov	4	23 ^{K)}	
			3. Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi dalam penyusunan data kesehatan anak	K/L	1	1	
prov	4	19 ^{K)}					
2.3	Penyusunan dan harmonisasi kebijakan pemenuhan hak partisipasi anak	Meningkatnya jumlah kebijakan pemenuhan hak partisipasi anak	1. Jumlah kebijakan pemenuhan hak partisipasi anak		1	2 ^{K)}	12,8
			2. Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi dalam pemenuhan hak partisipasi anak	K/L	-	1	
				prov	2	25 ^{K)}	
			3. Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi dalam penyusunan data pemenuhan hak partisipasi anak	K/L	-	3 ^{K)}	
prov	1	17 ^{K)}					
2.4	Penyusunan dan harmonisasi kebijakan lingkungan yang layak untuk anak	Meningkatnya jumlah kebijakan lingkungan yang layak untuk anak	1. Jumlah kebijakan lingkungan yang layak untuk anak		2	2 ^{K)}	12,8
			2. Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi tentang lingkungan yang layak untuk anak	K/L	1	5 ^{K)}	
				prov	4	29 ^{K)}	
			3. Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi dalam penyusunan data lingkungan yang layak untuk anak	K/L	1	5 ^{K)}	
prov	1	12 ^{K)}					

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO	PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)	
				2010	2014		
2.5	Penyusunan dan harmonisasi kebijakan pengembangan kabupaten/kota layak anak (KLA)	Meningkatnya jumlah kebijakan pengembangan kabupaten/kota layak anak (KLA)	1. Jumlah kebijakan pengembangan kabupaten/kota layak anak (KLA)		2	2 ^{K)}	49,0
			2. Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi tentang kota layak anak	K/L	1	10	
				prov	10	10	
			3. Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi dalam penyusunan data pengembangan kabupaten/kota layak anak (KLA)	K/L	1	2	
prov	7	25 ^{K)}					
2.6	Penyusunan dan harmonisasi kebijakan penghapusan kekerasan pada anak	Meningkatnya jumlah kebijakan penghapusan kekerasan pada anak	1. Jumlah kebijakan penghapusan kekerasan pada anak		1	4 ^{K)}	11,8
			2. Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi tentang penghapusan kekerasan pada anak	K/L	1	6 ^{K)}	
				prov	5	26 ^{K)}	
			3. Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi dalam penyusunan data anak korban kekerasan	K/L	1	1	
				prov	2	13 ^{K)}	
			2.7	Penyusunan dan harmonisasi kebijakan tentang masalah sosial anak	Meningkatnya jumlah perlindungan anak dari masalah sosial	1. Jumlah kebijakan perlindungan anak dari masalah sosial	
2. Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi tentang perlindungan anak dari masalah sosial	K/L	2				5	
	prov	5				8	
3. Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi dalam penyusunan data perlindungan anak dari masalah sosial	K/L	1				1	
	prov	2				17 ^{K)}	

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO	PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)	
				2010	2014		
2.8	Penyusunan dan harmonisasi kebijakan untuk penanganan anak yang berhadapan dengan hukum	Meningkatnya jumlah kebijakan untuk penanganan anak yang berhadapan dengan hukum	1. Jumlah kebijakan penanganan anak yang berhadapan dengan hukum		3	7 ^{K)}	30,5
			2. RUU Peradilan Pidana Anak		1 Naskah Akademik	1 RUU	
			3. Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi tentang penanganan anak yang berhadapan dengan hukum	K/L	2	6	
				prov	8	7	
4. Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi dalam penyusunan data anak yang berhadapan dengan hukum	K/L	1	3				
	prov	3	15 ^{K)}				
2.9	Penyusunan dan harmonisasi kebijakan perlindungan bagi anak yang berkebutuhan khusus	Meningkatnya jumlah kebijakan perlindungan bagi anak yang berkebutuhan khusus	1. Jumlah kebijakan perlindungan bagi anak yang berkebutuhan khusus		2	3 ^{K)}	17,2
			2. Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi tentang perlindungan anak yang berkebutuhan khusus	K/L	1	8 ^{K)}	
				prov	5	11	
			3. Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi dalam penyusunan data anak yang berkebutuhan khusus	K/L	-	5 ^{K)}	
prov	-	15 ^{K)}					
2.10	Penyusunan dan harmonisasi kebijakan hak sipil anak	Meningkatnya jumlah kebijakan hak sipil anak	1. Jumlah kebijakan hak sipil anak		1	3 ^{K)}	11,2
			2. Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi tentang hak sipil anak	K/L	1	5 ^{K)}	
				prov	10	29 ^{K)}	
			3. Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi dalam penyusunan data hak sipil anak	K/L	1	5 ^{K)}	
prov	3	10 ^{K)}					

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO	PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
3.	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	1. Meningkatnya jumlah dokumen perencanaan, pengembangan dan evaluasi SDM dan penganggaran KPP dan PA yang diselesaikan tepat waktu, dilaksanakan, dipantau dan dievaluasi berdasarkan tersedianya data terkini, terintegrasi, dan harmonis	% rencana program dan anggaran KPP dan PA yang diselesaikan tepat waktu, dilaksanakan, dipantau dan dievaluasi berdasarkan tersedianya data terkini, terintegrasi dan harmonis	100	100	303,5
		2. Meningkatnya laporan evaluasi kinerja pembangunan Gender dan Anak berdasarkan data terkini, terintegrasi dan harmonis	% laporan evaluasi kinerja pembangunan Gender dan Anak berdasarkan data terkini, terintegrasi dan harmonis	100	100	
		3. Meningkatnya layanan sarana prasarana, keuangan dan pengembangan SDM yg sesuai kebutuhan dan akuntabel	% layanan sarana prasarana, keuangan dan pengembangan SDM yg sesuai kebutuhan dan akuntabel	100	100	
3.1	Koordinasi penyusunan perencanaan program dan anggaran, dan kerjasama luar negeri	Meningkatnya rencana program dan anggaran serta evaluasi kinerja organisasi yang diselesaikan, dilaksanakan, dipantau dan dievaluasi tepat waktu, terintegrasi dan harmonis dengan dokumen perencanaan lainnya (RPJPN, RPJMN, Renstra)	1. % rencana program dan anggaran yang diselesaikan tepat waktu berdasarkan data terkini, terintegrasi dan harmonis dengan dokumen perencanaan lainnya (RPJPN, RPJMN, Renstra)	100	100	45,4
			2. Jumlah laporan rencana dan evaluasi kinerja organisasi	1	5 ^{K)}	
			3. % kegiatan tindak lanjut dari kerjasama Bilateral dan Multilateral	100	100	
			4. % laporan bahan pimpinan dan movev pelaksanaan kinerja program di lingkup KPP dan PA	100	100	

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO	PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
3.5	Pengawasan pelaksanaan perlindungan anak (KPAI)	Meningkatnya jumlah pengawasan pelaksanaan perlindungan anak	1. Jumlah pengawasan pelaksanaan perlindungan anak di prov (prov)	33	33	43,0
			2. Jumlah rekomendasi hasil pelaksanaan perlindungan anak (laporan)	1	5 ^{K)}	
			3. % layanan prasarana keuangan tepat waktu, sesuai kebutuhan, dan akuntabel	100	100	
TOTAL ALOKASI KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2010-2014						868,2

K : Angka kumulatif 5 tahun (2010-2014)

**RENCANA TINDAK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH 2010-2014
PER KEMENTERIAN/LEMBAGA**

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PAN DAN REFORMASI BIROKRASI

NO	PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
1.	PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENEG PAN DAN RB	Terwujudnya peningkatan kinerja manajemen internal dalam rangka pelaksanaan tugas Kementerian	1. Persentase rapat-rapat koordinasi dengan instansi Pusat dan Daerah, dalam rangka pelaksanaan program-program PAN	100%	100%	367,7
			2. Persentase dokumen administrasi perencanaan, perkantoran, kepegawaian, dan keuangan yang dapat diselesaikan tepat waktu	100%	100%	
			3. Persentase pegawai Kementerian Negara PAN & RB yang mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural, fungsional, dan kursus lainnya	25%	85%	
			4. Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan yang dapat diselesaikan tepat waktu	100%	100%	
			5. Persentase pemberitaan tentang Kementerian Negara PAN & RB di media nasional	100%	100%	
			6. Persentase barang milik negara yang tercatat/terinventarisasi sesuai kaidah pencatatan BMN	85%	100%	
			7. Persentase kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan aturan	85%	100%	
			8. Tersusunnya kebijakan/pedoman tentang budaya kerja "bersih, melayani, dan kompeten" di lingkungan aparatur negara		1 Perpres ^{ko}	
			9. Terlaksananya kampanye budaya kerja "bersih, melayani, dan kompeten" di lingkungan aparatur negara	10%	100%	

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PAN DAN REFORMASI BIROKRASI

NO	PROGRAM/KEGIATAN/PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
			10. Jumlah instansi pemerintah yang menjadi <i>Pilot Project</i> pengembangan budaya kerja	2 IP	30 IP ^{K)}	
2.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR KEMENEG PAN DAN RB	Terwujudnya peningkatan kualitas sarana dan prasarana internal dalam rangka pelaksanaan tugas Kementerian	Rasio sarana dan prasarana yang tersedia dengan kebutuhan pegawai sesuai standar kualitas pelayanan yang baik	85%	100%	21,0
3.	PROGRAM PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI	1. Terwujudnya organisasi pemerintah yang proporsional, efektif dan efisien	1. Jumlah peraturan/kebijakan di bidang Kelembagaan	8 aturan	40 aturan ^{K)}	454,5
			2. Persentase Kementerian Negara yang telah tertata organisasi dan tata kerjanya	20%	100%	
			3. Persentase LPNK yang telah tertata organisasi dan tata kerjanya	20%	100%	
			4. Persentase LNS yang telah tertata organisasi dan tata kerjanya	20%	100%	
			5. Persentase Perwakilan RI di Luar Negeri yang telah tertata organisasi dan tata kerjanya	20%	100%	
			6. Persentase Sekretariat Lembaga Negara yang telah tertata organisasi dan tata kerjanya	20%	100%	
			7. Persentase Instansi Pemerintah (PPK-BLU) yang telah tertata organisasi dan tata kerjanya	20%	100%	
			8. Persentase Konsolidasi struktural dan peningkatan Kapasitas Kemeneg PAN dan RB, BKN, dan LAN	100%	100%	
		2. Terwujudnya SDM Aparatur yang profesional, berkinerja, akuntabel dan sejahtera	1. Jumlah peraturan/kebijakan di bidang SDM Aparatur	11 PP, 1 Perpres, 2 aturan	1 UU, 35 PP, 2 Perpres, 8 aturan ^{K)}	
			2. Persentase instansi pemerintah yang mengirimkan data usulan formasi PNS secara akurat dan benar sesuai aturan	40%	100%	

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PAN DAN REFORMASI BIROKRASI

NO	PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
			3. Persentase penurunan tingkat pelanggaran disiplin PNS	20%	70%	
			4. Persentase instansi yang menerapkan kebijakan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)	5%	45%	
			5. Persentase instansi yang menyusun informasi jabatan dalam rangka penyusunan sistem remunerasi berdasarkan <i>merit system</i>	45%	90%	
			6. Persentase tenaga honorer yang telah dilakukan verifikasi dan validasi	100%	100%	
			7. Persentase peningkatan penghasilan PNS	5%	10%	
		3. Terwujudnya penyelenggaraan tata laksana pemerintah yang efisien, efektif dan akuntabel	1. Jumlah peraturan/kebijakan di bidang Tata Laksana	1 UU, 2 aturan	5 UU, 18 PP, 8 ^{k)} aturan	
			2. Persentase instansi pemerintah yg melakukan penataan ketatalaksanaan	20%	100%	
		4. Terwujudnya instansi pemerintahan yang akuntabel dan berkinerja tinggi	1. Jumlah peraturan/kebijakan di bidang Akuntabilitas Kinerja	6 aturan	1 UU, 30 ^{k)} aturan	
			2. Persentase instansi yang menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja sesuai aturan	45%	60%	
			3. Persentase instansi yang dinilai akuntabel	40%	55%	
			4. Persentase instansi yang menyusun RKT (Rencana Kinerja Tahunan)	20%	36%	
			5. Persentase LAKIP yang diterima	87%	99%	
			6. Persentase PK yang diterima	45%	70%	
			7. Persentase instansi peserta model <i>Island of Integrity</i> yang berhasil	30%	45%	
		5. Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik	1. Jumlah Peraturan/Kebijakan di bidang Pelayanan Publik	5 PP, 1 Perpres, 3 aturan	5 PP, 1 Perpres, 1 Inpres, 14 ^{k)} aturan	

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PAN DAN REFORMASI BIROKRASI

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
			2. Jumlah Kabupaten/Kota yang mempresentasikan kepuasan pelanggan yang disurvei berdasarkan Indeks Kepuasan Masyarakat	33 Kab/ Kota	165 Kab/ Kota ^{K)}	
			3. Skor IKM unit pelayanan	60	85	
			4. Jumlah unit pelayanan yang dinilai berdasarkan usulan instansi/Pemerintah Provinsi	120	300	
			5. Jumlah Pemda yang dinilai berdasarkan usulan instansi/Pemerintah Provinsi	-	120	
			6. Persentase unit pelayanan/Pemda yang berkategori terbaik sesuai penilaian	50%	90%	
			7. Persentase unit pelayanan/Pemda yang berkategori terbaik sesuai penilaian	50%	90%	
			8. Persentase Pemerintah Daerah yang menerapkan OSS	75%	95%	
			9. Jumlah Kab/Kota yang menerapkan pedoman peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis partisipasi masyarakat.	10 Kab/ Kota	135 Kab/ Kota ^{K)}	
			10. Jumlah unit pelayanan publik yang menerapkan pedoman peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis partisipasi masyarakat	30 Unit	350 unit ^{K)}	
		6. Terwujudnya penyelenggaraan pengawasan pemerintah yang terintegrasi, efisien dan efektif	1. Jumlah peraturan/kebijakan di bidang pengawasan	7 aturan	1 UU, 1 Perpres, 35 aturan ^{K)}	
			2. Persentase instansi pemerintah yang melaksanakan SPI sesuai dengan ketentuan	40%	90%	
			3. Persentase jumlah temuan yang ditindaklanjuti dalam waktu satu tahun	60%	90%	
			4. Persentase laporan dumas yang disalurkan dan telah ditindaklanjuti oleh instansi pemerintah	60%	90%	

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PAN DAN REFORMASI BIROKRASI

NO	PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
			5. Persentase instansi pemerintah yang melaksanakan dan melaporkan Inpres Percepatan Pemberantasan Korupsi yang dievaluasi sesuai pedoman	60%	90%	
		7. Meningkatkan pelaksanaan reformasi birokrasi instansi secara terencana, sistematis, dan komprehensif	1. Jumlah K/L yang telah melaksanakan reformasi birokrasi sesuai kebijakan RB Nasional	17 K/L	75 K/L	
			2. Tingkat kualitas pelaksanaan RB yang terukur sesuai dengan kebijakan RB Nasional	70%	100%	
			3. Jumlah kebijakan pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang diterbitkan (Grand Design RBN dan kebijakan pelaksanaannya.	100%	100%	
			4. Jumlah instansi yang menerima sosialisasi	100% K/L; 30% Pemda	100% K/L; 100% Pemda	
			5. Jumlah asistensi reformasi birokrasi kepada instansi pusat dan daerah	100% K/L; 10% Pemda	100% K/L; 20% Pemda	
			6. Jumlah laporan monitoring dan evaluasi	4 laporan triwulanan	20 laporan triwulanan	
1.	Pengembangan kebijakan, koordinasi dan evaluasi pengawasan intern pemerintah	- Tersusunnya UU tentang Sistem Pengawasan Nasional dan peraturan pelaksanaannya	Jumlah undang-undang dan peraturan pelaksanaannya	-	1 UU, ^{K)} 3 peraturan pelaksanaan, 1 sosialisasi	13,9
		- Tersusunnya kebijakan tentang Pakta Integritas bagi instansi pemerintah	Jumlah Perpres tentang kebijakan/pedoman penerapan Pakta Integritas	-	1 ^{K)}	
2.	Pengembangan kebijakan penegakan integritas SDM aparatur	- Tersusunnya dan disempurnakannya aturan hukum yang mengatur penegakan integritas aparatur	- Jumlah PP tentang Disiplin PNS	1	1, ^{K)} 2 sosialisasi	9,0
			- Jumlah PP Larangan PNS menjadi anggota Parpol	-	1 ^{K)}	
			- Jumlah PP tentang Jiwa Korps dan Kode Etik PNS	-	1 ^{K)}	

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PAN DAN REFORMASI BIROKRASI

NO	PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
			- Jumlah PP tentang pembatasan konflik kepentingan	-	1 ^{K)}	
3.	Pengembangan kebijakan, koordinasi, monitoring dan evaluasi Percepatan Pemberantasan Korupsi	Tersusun dan terlaksananya kebijakan, koordinasi, monitoring dan evaluasi percepatan pemberantasan korupsi	- Jumlah peraturan/kebijakan (Inpres Percepatan Pemberantasan Korupsi) - Persentase instansi pemerintah yang melaksanakan dan melaporkan Inpres Percepatan Pemberantasan Korupsi yang dievaluasi sesuai pedoman	1 Inpres 60%	1 Inpres ^{K)} 90%	24,6
4.	Pengembangan kebijakan, koordinasi dan evaluasi pengawasan masyarakat	Meningkatnya pengawasan masyarakat yang efektif dan efisien	Jumlah peraturan/kebijakan di bidang pengawasan masyarakat Persentase laporan pengaduan masyarakat yang disalurkan dan telah ditindaklanjuti oleh instansi pemerintah	1 kebijakan 60%	 90%	6,2
5.	Pelaksanaan dukungan perumusan kebijakan PAN	Tersusunnya kebijakan/pedoman tentang budaya kerja "bersih, melayani, dan kompeten" di lingkungan aparatur negara; Terlaksananya kampanye budaya kerja "bersih, melayani, dan kompeten" di lingkungan aparatur negara.	- Jumlah kebijakan/pedoman; - Persentase jumlah kampanye di media cetak dan elektronik - Jumlah instansi Pemerintah yang menjadi Pilot Project Pengembangan Budaya Kerja sesuai kebijakan	- 10% 2 IP	1 Perpres ^{K)} 100% 30 IP ^{K)}	3,5
6.	Koordinasi perencanaan dan evaluasi program pelayanan publik (Prioritas Nasional)	Tersusunnya peraturan pelaksanaan dari UU No. 25/2009 tentang Pelayanan Publik	- Jumlah PP - Jumlah Perpres - Persentase instansi yang telah mendapatkan sosialisasi	5 1 35%	5 ^{K)} 1 ^{K)} 100%	18,3
7.	Peningkatan koordinasi dan evaluasi pelayanan di bidang kesejahteraan sosial (Prioritas Nasional)	Terlaksananya penilaian, monitoring dan evaluasi pelayanan publik.	- Tersusunnya instrumen penilaian, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik - Laporan movev pelaksanaan penilaian pelayanan	1 -	1 ^{K)} 4 ^{K)}	23,9

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PAN DAN REFORMASI BIROKRASI

NO	PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
		Tersusunnya kebijakan percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik	- Jumlah inpres tentang percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik	1	1 ^{K)}	
		Terlaksananya asistensi untuk mendorong penerapan OSS/PTSP	- Persentase Pemerintah Daerah yang menerapkan OSS (pelayanan terpadu satu pintu)	70%	95%	
8.	Peningkatan koordinasi dan evaluasi pelayanan publik di bidang pemerintahan umum, hukum dan keamanan (Prioritas Nasional)	Terlaksananya kompetisi antar unit pelayanan publik/ antar instansi dan Pemerintah Daerah	- Jumlah unit pelayanan yang dinilai berdasarkan usulan - Jumlah Pemda yang dinilai berdasarkan usulan Provinsi	150 unit 100 Kab/ Kota	1250 unit ^{K)} 550 Kab/ Kota ^{K)}	23,6
			- Persentase unit pelayanan/Pemda yang berkategori terbaik sesuai penilaian	50%	90%	
			- Persentase unit pelayanan/Pemda yang berkategori baik sesuai penilaian	50%	90%	
9.	Koordinasi perencanaan dan evaluasi program kelembagaan (Prioritas Nasional)	- Terlaksananya konsolidasi struktural dan peningkatan kapasitas Kemeneg PAN dan RB, LAN, dan BKN. - Terlaksananya penataan kelembagaan instansi pemerintah lainnya	- Persentase penyelesaian konsolidasi struktural dan peningkatan kapasitas Kemeneg PAN & RB, BKN, LAN. - ersentase instansi pemerintah (PPK-BLU) yang telah tertata kelembagaannya - Persentase LNS yang telah tertata organisasi dan tata kerjanya	100% 20% 20%	100% 100% 100%	5,1
10.	Pengembangan kebijakan, koordinasi dan evaluasi kelembagaan polhukam (Prioritas Nasional)	Terlaksananya penataan kelembagaan instansi pemerintah lainnya, bidang polhukhankam	- Persentase Kementerian Negara bidang Polhukam yang telah tertata organisasi dan tata kerjanya (antara lain Kementerian Sekretariat Negara) - Persentase LPNK bidang polhukam yang telah tertata organisasi dan tata kerjanya, terutama bidang pemanfaatan tanah dan penataan ruang bagi kepentingan rakyat (BPN). - Persentase Sekretariat Lembaga Negara yang telah tertata organisasi dan tata kerjanya	20% 20% 20%	100% 100% 100%	5,2

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PAN DAN REFORMASI BIROKRASI

NO	PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
11.	Pengembangan kebijakan, koordinasi dan evaluasi kelembagaan perekonomian I (Prioritas Nasional)	Terlaksananya penataan kelembagaan instansi pemerintah lainnya, bidang perekonomian I	- Persentase Kementerian Negara bidang perekonomian I yang telah tertata organisasi dan tata kerjanya, <u>terutama</u> bidang penguatan keberdayaan UKMK (Kemeneq UKMK, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan), pemanfaatan sumber daya kelautan (Kementerian Kelautan dan Perikanan), pemanfaatan tanah dan penataan ruang bagi kepentingan rakyat (Kementerian PU, Kementerian Kehutanan) dan Kemeneq PPN)	20%	100%	12,0
			- Persentase LPNK bidang perekonomian I yang telah tertata organisasi dan tata kerjanya	20%	100%	
			- Persentase Perwakilan RI yang telah tertata organisasi dan tata kerjanya	20%	100%	
12.	Pengembangan Kebijakan, Koordinasi dan Evaluasi Kelembagaan Perekonomian II (Prioritas Nasional)	Terlaksananya penataan kelembagaan instansi pemerintah lainnya, bidang perekonomian II	- Persentase Kementerian Negara bidang Perekonomian II yang telah tertata organisasi dan tata kerjanya, <u>terutama</u> bidang pengelolaan energi (Dep. ESDM, restrukturisasi BUMN (Kemeneq BUMN), pemanfaatan tanah dan penataan ruang bagi kepentingan rakyat (Dep. Pertanian) dan Kemeneq Ristek)	20%	100%	3,7
			- Persentase LPNK bidang Perekonomian II yang telah tertata organisasi dan tata kerjanya	20%	100%	
13.	Pengembangan kebijakan, koordinasi dan evaluasi kelembagaan kesra	Terlaksananya penataan kelembagaan instansi pemerintah lainnya, bidang kesra	- Persentase Kementerian Negara bidang kesra yang telah tertata organisasi dan tata kerjanya (antara lain Kementerian Pendidikan Nasional)	20%	100%	3,4
			- Persentase LPNK bidang kesra yang telah tertata organisasi dan tata kerjanya	20%	100%	
			- Persentase Pemda yang dievaluasi organisasi dan tatakernjanya	20%	100%	

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PAN DAN REFORMASI BIROKRASI

NO	PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
14.	Pengembangan kebijakan, koordinasi dan evaluasi tata laksana perekonomian	Tersusunnya kebijakan tentang Administrasi Pemerintahan	Jumlah UU, peraturan pelaksanaan dan sosialisasinya	-	1 UU, 2 PP, 2 sosialisasi ^{K)}	18,5
15.	Pengembangan kebijakan, koordinasi dan evaluasi tata laksana korporatisasi	Tersusunnya kebijakan tentang Etika Penyelenggara Negara	Jumlah UU, peraturan pelaksanaan dan sosialisasinya	1 RUU	1 RUU, 1 UU, 3 PP, 3 Sosialisasi ^{K)}	12,9
16.	Pengembangan kebijakan pematapan pengembangan SDM aparatur (Prioritas Nasional)	- Tersusunnya kebijakan tentang manajemen kepegawaian (<i>UU tentang SDM Aparatur Negara</i>).	Jumlah UU dan peraturan pelaksanaannya	-	1 RUU, 1 UU dan peraturan pelaksanaannya, 2 sosialisasi ^{K)}	11,3
		- Tersusunnya kebijakan tentang pola dasar karir PNS	Jumlah Perpres;	1 Perpres	1 Perpres, 1 sosialisasi ^{K)}	
		- Tersusunnya kebijakan tentang penilaian kinerja pegawai (SKP)	Jumlah PP	1 PP	1 PP ^{K)}	
		- Tersusunnya kebijakan tentang penilaian, pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan jabatan struktural	Jumlah Perpres	1 Perpres	1 Perpres ^{K)}	
		- Tersusunnya kebijakan diklat jabatan PNS	Jumlah PP	-	1 PP ^{K)}	
		- Tersusunnya kebijakan tentang pengangkatan PNS dalam jabatan struktural	Jumlah PP	-	1 PP ^{K)}	

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PAN DAN REFORMASI BIROKRASI

NO	PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
17.	Pengembangan kebijakan kesejahteraan SDM aparatur (Prioritas Nasional)	- Tersusunnya kebijakan (UU/ PP) tentang remunerasi dan tunjangan kinerja Pegawai Negeri	- Jumlah UU/PP tentang remunerasi/tunjangan kinerja Pegawai Negeri;	1 UU/ PP	1 UU/PP ^{K)}	16,3
		- Tersusunnya kebijakan sistem pensiun PNS	- Jumlah UU/PP tentang Pensiun PNS	-	1 UU/PP ^{K)}	
		- Tersusunnya kebijakan tentang sistem pengelolaan dana pensiun PNS	- Jumlah kebijakan tentang pengelolaan dana pensiun PNS	1 PP	1 PP ^{K)}	
18.	Penyusunan kebijakan perencanaan SDM aparatur (Prioritas Nasional)	- Tersusunnya kebijakan (PP) tentang sistem pengadaan /rekrutmen dan Seleksi PNS	Jumlah PP	1 PP	1 PP, 2 sosialisasi ^{K)}	20,1
		- Tersusunnya kebijakan (PP) tentang Kebutuhan Pegawai (Formasi)	Jumlah PP	1 PP	1 PP ^{K)}	
19.	Evaluasi akuntabilitas kinerja aparatur dan penilaian kinerja aparatur	Terlaksananya pemantauan dan evaluasi penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Persentase Instansi pemerintah yang akuntabilitas kerjanya baik	40%	55%	8,7
20.	Pembinaan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Aparatur	Terlaksananya penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Persentase instansi yang menerapkan sistem akuntabilitas kinerja	45%	80%	9,2
21.	Pengembangan Sistem akuntabilitas kinerja aparatur negara	- Tersusun dan tersosialisasikannya Undang-undang Akuntabilitas Penyelenggara Negara dan peraturan pelaksanaannya	Jumlah UU dan peraturan pelaksanaannya	-	1 RUU, ^{K)} 1UU, 2 PP	12,8

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PAN DAN REFORMASI BIROKRASI

NO	PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
		- Tersusunnya kebijakan/pedoman pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja (termasuk penerapan sistem <i>reward and punishment</i> bagi kinerja instansi pemerintah, penerapan kontrak kinerja pada setiap jabatan aparatur negara)	Jumlah kebijakan/pedoman	-	1 kebijakan, 4 ^{K)} pedoman	
22.	Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan reformasi birokrasi (Prioritas Nasional)	Meningkatnya koordinasi penyusunan kebijakan dan pelaksanaan reformasi birokrasi	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi yang diterbitkan (grand design RBN dan kebijakan pelaksanaannya) - Tingkat kualitas pelaksanaan RB yg terukur sesuai dg kebijakan RB Nasional - Persentase instansi yang menerima sosialisasi - Persentase instansi pusat dan daerah yang dilakukan konsultasi asistensi reformasi birokrasi - Jumlah laporan monitoring dan evaluasi - Persentase K/L yang telah melaksanakan Reformasi Birokrasi sesuai kebijakan nasional 	<ul style="list-style-type: none"> 100% 70% 100% K/L; 30% Pemda 100% K/L, 10% Pemda 4 laporan triwulanan 20% 	<ul style="list-style-type: none"> 100% 100% 100% Pemda 100% Pemda 20 laporan triwulanan 100% 	62,7
ALOKASI KEMENTERIAN PAN DAN REFORMASI BIROKRASI 2010-2014						843,2

K : Angka kumulatif 5 tahun (2010-2014)

**RENCANA TINDAK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH 2010-2014
PER KEMENTERIAN/LEMBAGA**

KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN INTELIJEN NASIONAL

NO	PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya BIN	Meningkatnya dukungan pelayanan secara teknis dan administrasi intelijen negara	Meningkatnya dukungan pelayan secara teknis dan administrasi intelijen	30%	32%	1.898,76
a.	Kegiatan Penyelenggaraan Dukungan Administrasi Operasi Intelijen	Terselenggaranya dukungan administrasi operasi intelijen	Jumlah anggaran yang tersedia	30%	32%	1.055,29
2	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Intelijen Negara	Meningkatnya pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan intelijen negara	Kualitas pemeriksaan dan pengawasan yang meningkat	30%	32%	19,85
3	Program Pengembangan Penyelidikan, Pengamanan, dan Penggalangan Keamanan Negara	Meningkatnya Pelaksanaan Penyelidikan, Pengamanan dan Penanggulangan Keamanan Negara	a. Meningkatnya cakupan penyelidikan, pengamanan,	30%	32%	4.030,09
			b. Terpantaunya kegiatan intelijen pihak lain atau negara lain	30%	32%	
			c. Tersedianya laporan intelijen cepat, tepat dan akurat	30%	32%	
			d. Meningkatnya kapasitas institusi intelijen negara	30%	32%	
a.	Kegiatan Operasi Intelijen Luar Negeri	Meningkatnya pelaksanaan penyelidikan beraspek luar negeri, Ekonomi, Sosial, Budaya	% kecukupan penggelaran pos intelijen luar negeri	30%	33%	192,00
b.	Kegiatan Operasi Intelijen Dalam Negeri	Meningkatnya pelaksanaan penyelidikan beraspek dalam negeri	Rasio kecukupan personel daerah terhadap jumlah kabupaten/kota	30%	33%	1.324,56
c.	Kegiatan Operasi Kontra Intelijen	Meningkatnya upaya kontra intelijen	% pemantauan intelijen lawan	30%	33%	890,32
d.	Kegiatan Operasi Intelijen Ekonomi	Meningkatnya pelaksanaan penyidikan beraspek Ekonomi	% pemantauan intelijen beraspek ekonomi.	30%	33%	692,40
TOTAL ALOKASI BIN 2010-2014						5.948,7

**RENCANA TINDAK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH 2010-2014
PER KEMENTERIAN/LEMBAGA**

KEMENTERIAN/LEMBAGA : LEMBAGA SANDI NEGARA

NO	PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
1.	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Lembaga Sandi Negara	Pelayanan administrasi perkantoran lemsaneg secara akuntabel dan pemenuhan kebutuhan aparatur persandian dan pendukungnya	a. Jumlah dokumen administrasi (paket)	211	1225 K)	654,9
			b. Jumlah layanan administrasi (paket)	26	130 K)	
			c. % Kepuasan user terhadap layanan administratif dan sarana perkantoran	95%	98%	
			d. Jumlah lulusan pendidikan sandi dan pendukungnya (orang)	339	1895 K)	
2.	Program Pengembangan Persandian Nasional	Terselenggaranya persandian sesuai kebijakan nasional, terdukungnya komunikasi rahasia, kemandirian teknologi persandian	a. Jumlah dokumen kebijakan persandian (paket)	12	273 K)	2.759,6
			b. Jumlah operasional pengamanan komunikasi rahasia (kali)	716	3580 K)	
			c. Jumlah kajian teknologi persandian (paket)	11	58 K)	
a.	Pengamanan Sinyal	Meningkatnya kebijakan, penggelaran infrastruktur, dan layanan pengamanan sinyal	Jumlah Layanan pengamanan sinyal (paket)	710	3550 K)	2.184,6
b.	Analisa sinyal	Pengamanan persandian melalui analisis teknis sandi dan analisis kriptografi	Jumlah Layanan analisa sinyal (paket)	26	130 K)	169,8
c.	Operasionalisasi Materiil Sandi	Tersedianya materiil sandi guna mendukung terselenggaranya komunikasi rahasia	Distribusi Material Sandi (lokasi)	115	625 K)	179,7
d.	Pengkajian dan pengembangan peralatan sandi	Tersedianya kajian pengembangan peralatan sandi	Jumlah hasil pengkajian dan pengembangan peralatan sandi (paket)	3	13 K)	34,7
TOTAL ALOKASI LEMSANEG 2010-2014						3.414,5

K : Angka kumulatif 5 tahun (2010-2014)

**RENCANA TINDAK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH 2010-2014
PER KEMENTERIAN/LEMBAGA**

KEMENTERIAN/LEMBAGA : DEWAN KETAHANAN NASIONAL

NO	PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Wantanas	Meningkatnya kelancaran pengelolaan dan kecukupan dukungan operasional pelaksanaan tugas Wantanas	a. % Pelayanan administrasi dan pelaksanaan kajian sesuai dengan kebutuhan.	30%	32%	72,7
			b. Tingkat kecepatan rata-rata penyelesaian urusan tata usaha untuk Sesjen, Kedeputian dan Biro	45%	47%	
			c. % Laporan asset Wantannas yang dinilai wajar	80%	82%	
			d. Laporan keuangan WTP berkelanjutan	90%	100%	
2	Program Pengembangan Kebijakan Ketahanan Nasional	Terlaksananya kajian tentang Ekonomi, Sosial Budaya, Hukum dan Perundang-undangan, Politik Nasional, Perencanaan Kontijensi, Lingkungan Strategis Nasional, Lingkungan Strategis Regional, dan Lingkungan Strategis Internasional	a. Tersedianya kajian dalam bentuk saran tindak dan rencana kontijensi bidang pengembangan pembangunan nasional untuk mengatasi permasalahan keamanan internal, keamanan eksternal dan bencana berskala besar;	15%	17%	127,7
			b. Terselenggaranya hubungan kemitraan kerja dengan para pakar dari jalur aspiratif, jalur akademik, dan jalur empirik;	15%	17%	
			c. Terwujudnya sasaran program ditinjau dari volume, waktu dan kuantitas serta kualitas hasil kajian yang menjadi kewenangan Wantanas	15%	17%	
			d. Tersedianya sistem teknologi informasi yang mampu menyajikan data secara cepat, akurat, aman dan lengkap	45%	47%	
a.	Penyelenggaraan Perumusan Kebijakan Ketahanan Nasional Bidang Lingkungan Strategis Nasional, Lingkungan Strategis Regional, dan Lingkungan Strategis Internasional	Terlaksananya penyelenggaraan perumusan kebijakan Ketahanan Nasional Bidang Lingkungan Strategis Nasional, Lingkungan Strategis Regional, dan Lingkungan Strategis Internasional	Jumlah Kajian Pokja, Pokjasus, Rakertas, Ramusmat, Kirpat bidang lingkungan strategis Nasional, Lingkungan Strategis Regional, dan Lingkungan Strategis Internasional (paket)	40	200 K)	25,9
TOTAL ALOKASI WANTANAS 2010-2014						200,4

K : Angka kumulatif 5 tahun (2010-2014)

**RENCANA TINDAK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH 2010-2014
PER KEMENTERIAN/LEMBAGA**

KEMENTERIAN/LEMBAGA: BADAN PUSAT STATISTIK

No	PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
1.	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PELAYANAN INFORMASI STATISTIK	Meningkatnya penyediaan dan pelayanan data dan informasi statistik	Terlaksananya kegiatan sensus dan survei	Terlaksananya Sensus Penduduk 2010	Terlaksananya statistik wilayah kecil dan PODES	8.396,1
a.	Pengembangan metodologi sensus dan survei	Tersedianya Kerangka Contoh Induk Survei Rumah tangga, dan pelaksanaan <i>Post Enumeration on Survey (PES)</i> terhadap Sensus	Terselenggaranya <i>Post Enumeration Survey (PES)</i> terhadap Sensus Penduduk 2010, Sensus Pertanian 2013, serta persiapan Sensus Ekonomi 2016	Penyelenggaraan PES Sensus Penduduk 2010 serta <i>coverage</i> dan <i>content error</i> SP 2010 (<i>Preliminary report</i>)	Laporan <i>coverage</i> dan <i>content error</i> Sensus Pertanian 2013; <i>Coverage</i> dan <i>content error</i> SP 2010 ^{KO}	87,9
b.	Penyediaan dan pengembangan statistik kependudukan dan ketenagakerjaan	1. Tersedianya parameter demografi dan indikator indikator MDG's serta targeting beberapa kebijakan sosial melalui Sensus Penduduk (SP) 2010 2. Tersedianya data statistik ketenagakerjaan dan pengangguran pada tingkat nasional, propinsi, dan kab/kota	1. Tersedianya proyeksi penduduk 2010-2020 2. Tersedianya indikator untuk perencanaan, evaluasi, dan analisis sosial seperti pendidikan, lansia, perumahan, dan kecacatan, serta pencapaian MDG's Tersedianya indikator pengangguran dan kesempatan kerja	1. Angka sementara SP: Agustus 2010 2. Pelaksanaan Sensus Penduduk 2010 Dua kali setahun	Proyeksi penduduk 2010-2025 Analisis hasil SP 2010 ^{KO} Setiap bulan di tingkat nasional	3.903,0

KEMENTERIAN/LEMBAGA: BADAN PUSAT STATISTIK

No	PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
c.	Penyediaan dan Pengembangan Statistik Kesejahteraan Rakyat	Tersedianya data statistik kesejahteraan rakyat secara nasional, propinsi, kab/kota yang meliputi data karakteristik rumah tangga, perumahan, pendidikan, dan kesehatan	Cakupan dan Penyajian Hasil SUSENAS dipercepat	2 kali dalam 1 tahun di tingkat nasional dan propinsi, sekali untuk tingkat Kabupaten/Kota	Setiap Bulan untuk tingkat Nasional, triwulanan tingkat propinsi dan Bulanan Kab/Kota	946,6
d.	Penyediaan dan Pengembangan Statistik Ketahanan Sosial	Tersedianya data jumlah dan persentase penduduk miskin secara nasional, propinsi, dan kab/kota	Meningkatnya kualitas data statistic kemiskinan makro dan mikro	Perubahan tahun dasar Penghitungan Angka kemiskinan makro	Sensus potensi desa yang menghasilkan statistik wilayah kecil	204,4
e.	Penyediaan dan Pengembangan Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Tersedianya <i>data base</i> statistik pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan 2013	Terlaksananya Sensus Pertanian 2013	Statistik produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	Statistik produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan; Profil rumah tangga pertanian menurut sub sektor dan struktur ongkos usaha tanaman unggulan; Statistik pendapatan petani	1.262,0
f.	Penyediaan dan Pengembangan Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan	Tersedianya <i>data base</i> statistik peternakan, perikanan, dan kehutanan 2013	Terlaksananya Sensus Pertanian 2013	Statistik produksi tanaman perkebunan tahunan	Analisis Hasil Sensus Pertanian sektor perkebunan, perikanan dan peternakan	435,5
g.	Penyediaan dan Pengembangan Statistik Industri, Pertambangan dan Penggalian, Energi, dan Konstruksi	Tersedianya indikator perkembangan industri nasional setiap bulan, triwulan, dan tahunan	Timelag penyajian direktori dan publikasi data statistik industri besar dan sedang, tahunan	Oktober (t-2) tingkat propinsi	Agustus (t-2) tingkat propinsi	220,9

KEMENTERIAN/LEMBAGA: BADAN PUSAT STATISTIK

No	PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
h.	Penyediaan dan Pengembangan Statistik Harga	Tersedianya data inflasi dan Nilai Tukar Petani (NTP) di seluruh propinsi setiap bulan	1. Tersedianya data statistik keuangan pusat dan daerah; data direktori perusahaan komunikasi dan teknologi informasi; serta data statistik pariwisata	1. Angka/statistik keuangan daerah, BUMN/BUMD, dan lembaga keuangan, Penggunaan TI, dan statistik pariwisata tingkat nasional dan propinsi, Publikasi: Desember (pariwisata), Agustus (Keuangan)	1. Angka/statistik keuangan daerah, BUMN/BUMD, dan lembaga keuangan, Penggunaan TI, indeks melek teknologi, dan statistik pariwisata tingkat nasional dan propinsi, Publikasi: Desember (pariwisata), Agustus (Keuangan)	337,0
			2. Tersajinya data diagram timbang NTP 2012	2. NTP Tahun Dasar 2007 dengan lag 2 bulan	2. NTP tahun dasar 2012, disajikan bulanan dengan lag 1 bulan	
i.	Penyediaan dan Pengembangan Statistik Neraca Produksi	Tersedianya data PDB dan PDRB sektoral triwulanan dan tahunan (2010=100), tabel I-O Indonesia 2010, dan Sistem Neraca Lingkungan	1. Meningkatnya kualitas data PDB, PDRB dan Tabel I-O	Tahun dasar 2000=100, Tingkat nasional dan propinsi	Tahun dasar 2000=100, Tingkat Nasional dan propinsi dan Kabupaten/Kota	182,8
			2. Penurunan diskrepansi PDRB dengan PDB			
			3. Meningkatnya pemahaman terhadap SNA 2008 serta aplikasi sistem dan metodologi penyusunan neraca produksi			

KEMENTERIAN/LEMBAGA: BADAN PUSAT STATISTIK

No	PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
j.	Penyediaan dan Pengembangan Statistik Neraca Pengeluaran	Tersedianya data lebih berkualitas dari sisi pengeluaran untuk PDB/PDRB Nasional/Propinsi triwulanan dan tahunan dan PDRB Kab/kota tahunan (2010=100), Sistem neraca sosial ekonomi (SNSE), Neraca Arus Dana (NAD) serta implementasi SNA 2008	1. Meningkatnya cakupan, akurasi dan relevansi data PDB/PDRB, NAD dan SNSE dengan menyesuaikan konsep SNA 2008 2. Meningkatnya pemahaman terhadap SNA 2008 serta implementasinya sesuai kondisi Indonesia (SNN) Indonesia	1. Inventarisasi data dasar & pendukung untuk penyusunan PDB/PDRB (2010=100), NAD, dan SNSE 2. Penyamaan persepsi SNA 2008 dengan unit kerja non neraca internal BPS	1. Penyusunan PDB/PDRB (2010=100), NAD dan SNSE 2. Penyusunan SNN Indonesia (aplikasi SNA 2008 menurut institusi)	174,3
2	PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANA TUGAS TEKNIS BPS LAINNYA	Terwujudnya <i>good governance</i> dan pelayanan prima dibidang administrasi yang efektif, efisien, terpadu, dan berkualitas	Terwujudnya manajemen yang efisien, efektif, bersih dan bertanggung jawab, transparan serta bebas KKN melalui sistem pengawasan yang ketat berbasis teknologi informasi yang mutakhir	50%	90%	3.849,8
3.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR NEGARA	Terselenggaranya urusan rumah tangga, inventarisasi, penyimpanan, penghapusan, dan pengadaan sarana dan prasarana	Meningkatnya persentase cakupan pelayanan menyeluruh kepada BPS, jumlah pembangunan dan rehabilitasi gedung negara serta perlengkapan sarana dan prasarana	50%	80%	1.834,3
4.	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN AKUNTABILITAS APARATUR NEGARA BPS	Meningkatnya kualitas pengawasan dan pemeriksaan mencapai tertib administrasi yang wajar tanpa pengecualian	Persentase LAKIP yang sesuai ketentuan	50%	90%	26,1
TOTAL ALOKASI BADAN PUSAT STATISTIK 2010-2014						14.107,0

K : Angka kumulatif 5 tahun (2010-2014)

**RENCANA TINDAK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH 2010-2014
PER KEMENTERIAN/LEMBAGA**

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS

NO	PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
1	Program Perencanaan Pembangunan Nasional	1. Terwujudnya rencana pembangunan nasional (RPJMN dan RKP) yang berkualitas 2. Terlaksananya penugasan-penugasan lainnya dari Presiden/Pemerintah dalam kaitan kebijakan pembangunan nasional	1. % kesesuaian antara muatan rancangan RPJMN dengan RPJPN	100%	100%	1.416,3
			2. % kesesuaian antara muatan RPJMN dengan visi, misi, dan program Presiden terpilih	100%	100%	
			3. % kesesuaian antara muatan rancangan RKP dengan RPJMN	100%	100%	
			4. % kesesuaian rancangan Renstra KL dengan target/sasaran dalam rancangan RPJMN	100%	-	
			5. % kesesuaian rancangan Renja KL dengan target/sasaran dalam rancangan RKP	100%	100%	
2	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bappenas	Terlaksananya dukungan manajemen terhadap pelaksanaan tupoksi Kementerian PPN/Bappenas	1. % pelaksanaan reformasi birokrasi Kementerian PPN/Bappenas melalui penataan kelembagaan, ketatalaksanaan, dan sumber daya manusia	50%	100%	1.688,0
			2. Tingkat kepuasan stakeholder terhadap pelayanan Kementerian PPN/Bappenas	cukup	baik	
			3. % fasilitasi dan pembinaan di bidang perencanaan pembangunan nasional dengan mitra kerja, baik di pusat maupun daerah	cukup	baik	
3	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Bappenas	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur Kementerian PPN/Bappenas	1. % ketersediaan sarana dan prasarana aparatur Kementerian PPN/Bappenas	100%	100%	276,2
			2. Terlaksananya pembangunan gedung baru Bappenas	10%	-	

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS

NO	PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
4	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Bappenas	Meningkatnya akuntabilitas dan pengawasan aparatur Kementerian PPN/Bappenas	1. Opini WTP dari BPK	baik	baik	19,5
			2. Standar penilaian <i>good governance</i>	cukup	baik	
			3. Standar penilaian AKIP	cukup	baik	
TOTAL ALOKASI KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS 2010-2014						3.400,0

K : Angka kumulatif 5 tahun (2010-2014)

**RENCANA TINDAK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH 2010-2014
PER KEMENTERIAN/LEMBAGA**

KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN PERTANAHAN NASIONAL

NO	PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010- 2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
A	PROGRAM PENGELOLAAN PERTANAHAN NASIONAL					8.238,9
A.1	Pengelolaan Pertanahan Propinsi	Terlaksananya pengaturan dan penataan penguasaan dan pemilikan tanah, serta pemanfaatan dan penggunaan tanah secara optimal.	Neraca Penatagunaan Tanah di daerah (Prioritas Nasional 6)	100 kab/kota	500 kab/kota ^{K)}	54,9
Inventarisasi P4T (Prioritas Nasional 6)			335.665 bidang	1.678.325 bidang ^{K)}	366,3	
Terwujudnya pengembangan infrastruktur pertanahan secara nasional, regional dan sektoral, yang diperlukan di seluruh Indonesia		Cakupan peta pertanahan (Prioritas Nasional 7)	2.100.000 ha	10.500.000 ha ^{K)}	228,3	
Terlaksananya percepatan legalisasi aset pertanahan, ketertiban administrasi pertanahan dan kelengkapan informasi legalitas aset tanah		Jumlah bidang tanah yang dilegalisasi (Prioritas Nasional 7)	326.237 bidang	4.063.430 bidang ^{K)}	2.229,9	
Terlaksananya redistribusi tanah		Jumlah bidang tanah yang didistribusi (Prioritas Nasional 4)	210.000 Bidang	1.050.000 Bidang ^{K)}	912,7	
Berkurangnya sengketa, konflik dan perkara pertanahan serta mencegah timbulnya sengketa, konflik dan perkara pertanahan		Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan (Prioritas Nasional 7)	2.791 kasus	13.955 kasus ^{K)}	108,0	
Terwujudnya pengendalian Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah dan Pemberdayaan masyarakat dalam rangka peningkatan akses terhadap sumber ekonomi		Inventarisasi dan identifikasi tanah terindikasi terlantar (Prioritas Nasional 8)	75.900 ha	379.500 ha ^{K)}	36,3	
Data hasil inventarisasi Wilayah Pesisir, Pulau-Pulau Kecil, Perbatasan dan Wilayah Tertentu (WP3WT)		Inventarisasi Wilayah Pesisir, Pulau-Pulau Kecil, Perbatasan dan Wilayah Tertentu (WP3WT) (Prioritas Nasional 10)	200 SP	885 SP ^{K)}	98,8	

KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN PERTANAHAN NASIONAL

NO	PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010- 2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
A.2	Pengelolaan Wilayah Pesisir, Pulau-Pulau Kecil, Perbatasan dan Wilayah Tertentu (WP3WT) (di pusat)	Data hasil inventarisasi Wilayah Pesisir, Pulau-Pulau Kecil, Perbatasan dan Wilayah Tertentu (WP3WT)	Inventarisasi Wilayah Pesisir, Pulau-Pulau Kecil, Perbatasan dan Wilayah Tertentu (WP3WT) (Prioritas Nasional 10)	1 Paket	5 Paket K)	29,6
A.4	Pengelolaan Tanah Negara, Tanah Terlantar dan Tanah Kritis (Prioritas Bidang)	Terselenggaranya pengelolaan tanah negara, tanah terlantar dan kritis	Jumlah analisa ketersediaan tanah untuk kepentingan masyarakat, pemerintah, dan badan usaha	20%	100%	10,8
A.5	Pengelolaan Landreform (Prioritas Bidang)	Meningkatnya jumlah tanah negara yang ditegaskan menjadi Tanah Obyek Landreform (TOL) dan atau yang dikeluarkan dari TOL	Jumlah tanah negara yang ditegaskan menjadi Tanah Obyek Landreform (TOL) dan atau yang dikeluarkan dari TOL	20%	100%	36,6
A.6	Pengembangan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Penatagunaan Tanah (Prioritas Bidang)	Bertambahnya jumlah kabupaten/kota yg telah memiliki neraca penatagunaan tanah dan mengidentifikasi ketersediaan tanah untuk pembangunan	Jumlah kab/kota yang telah menyusun neraca penatagunaan tanah & mengidentifikasi ketersediaan tanah untuk pembangunan	20%	100%	51,0

KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN PERTANAHAN NASIONAL

NO	PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010- 2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
A.7	Survey Potensi Tanah (Prioritas Bidang)	Tersedianya Peta Nilai Potensi Tanah sesuai Standar Operasi dan Prosedur (SOP) sebagai referensi dan indikator ekonomi tanah untuk keadilan dan kesejahteraan rakyat	Peta dan informasi potensi nilai tanah dan kawasan	20%	100%	67,3
A.8	Pengaturan dan pengadaan tanah dan legalisasi tanah instansi pemerintah, dan BUMN/ BUMD (Prioritas Bidang)	Terlaksananya pengaturan pengadaan tanah pemerintah, penetapan hak atas tanah dan hak pengelolaan instansi pemerintah & BUMN/BUMD	Jumlah penetapan hak atas tanah dan hak pengelolaan	20%	100%	12,2
A.9	Pengukuran Dasar (Prioritas Bidang)	Bertambahnya luas wilayah yang telah diukur di dalam sistem referensi sesuai standar	Luas wilayah Indonesia yang telah terukur di dalam sistem referensi sesuai standar	20%	100%	65,4
A.10	Pemetaan Dasar (Prioritas Bidang)	Terlaksananya survei dan pemetaan dasar sesuai Standar Operasi dan Prosedur (SOP)	Jumlah peta dasar pertanahan yang dibuat sesuai standar	20%	100%	58,6
A.11	Pengelolaan Konsolidasi Tanah (Prioritas Bidang)	Meningkatnya jumlah bidang tanah yang dikonsolidasikan	Jumlah obyek potensi konsolidasi tanah	20%	100%	26,6
A.12	Pengaturan dan Penetapan Hak tanah (Prioritas Bidang)	Tersedianya rumusan kebijakan teknis dibidang pengaturan dan penetapan hak tanah serta meningkatnya pelaksanaan penetapan dan perizinan hak tanah.	Jumlah penetapan dan perizinan hak atas tanah (SK)	20%	100%	9,1
A.13	Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pertanahan (Prioritas Bidang)	Terlaksananya penanganan dan penyelesaian perkara pertanahan secara berkualitas	Jumlah perkara yang ditangani dan diselesaikan oleh BPN RI	20%	100%	13,6
A.14	Peningkatan Kualitas Pengukuran, Pemetaan, dan Informasi Bidang Tanah, Ruang dan Perairan (Prioritas Bidang)	Terlaksananya pengukuran, pemetaan dan informasi bidang tanah, ruang dan perairan yang berkualitas.	Jumlah penetapan batas dan pembangunan sistem informasi atas HGU, HGB, HPL dan HP	20%	100%	170,3

KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN PERTANAHAN NASIONAL

NO	PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010- 2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
A.15	Peningkatan Pendaftaran Hak Tanah dan Guna Ruang (Prioritas Bidang)	Terwujudnya pembinaan dan pengelolaan pendaftaran hak atas tanah, hak milik atas satuan rumah susun, tanah wakaf, guna ruang dan perairan, serta PPAT	Pembinaan dan pengelolaan hak atas tanah dan guna ruang	20%	100%	54,4
A.16	Pemberdayaan Masyarakat Dan Kelembagaan Dalam Pengelolaan Pertanahan (Prioritas Bidang)	Terselenggaranya akses masyarakat dan lembaga terhadap penguatan hak atas tanah, dan sumber permodalan dan produksi	Akses masyarakat dan lembaga terhadap penguatan hak atas tanah	20%	100%	10,8
A.17	Pengkajian, Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Pertanahan (Prioritas Bidang)	Berkurangnya jumlah sengketa pertanahan	Jumlah penyelesaian sengketa tanah	20%	100%	15,8
A.18	Pengkajian dan Penanganan Konflik Pertanahan (Prioritas Bidang)	Berkurangnya jumlah konflik pertanahan	Jumlah penanganan konflik tanah	20%	100%	13,6
A.19	Pengendalian Pertanahan (Prioritas Bidang)	Menurunnya luas tanah yang terindikasi terlantar	Luas tanah yang terindikasi terlantar	20%	100%	20,0

KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN PERTANAHAN NASIONAL

NO	PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010- 2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
B	PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA DI BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA					8.335,1
B.1	Pengembangan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Pertanahan dan Hubungan Masyarakat (Prioritas Nasional dan Prioritas Bidang)	Terlaksananya pengembangan peraturan perundang-undangan bidang pertanahan dan Hubungan Masyarakat	Jumlah paket rancangan peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang pertanahan dalam rangka mendukung pelaksanaan Undang-undang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Prioritas Nasional 5)	1 paket	5 paket K)	19,3
			Tersusunnya peraturan perundang-undangan pengadaan tanah untuk kepentingan umum (Prioritas Nasional 6)	1 paket	5 paket K)	10,4
B.2	Pengelolaan Data dan Informasi Pertanahan	Tersedianya data dan informasi pertanahan yang terintegrasi secara nasional (Sistem Informasi Manajemen Pertanahan Nasional / SIMTANAS)	Peningkatan akses layanan pertanahan melalui Larasita (Prioritas Nasional 7)	156 kab/kota	419 kab/kota	254,3
B.3	Pembinaan Organisasi Dan Pengelolaan Kepegawaian BPN (Prioritas Bidang)	Terlaksananya penataan organisasi dan layanan kepegawaian	Tersedianya konsep kelembagaan serta prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, dan terukur (SPOPP)	1 paket	5 paket K)	39,1
B.4	Pendidikan dan pelatihan bidang pertanahan (Prioritas Bidang)	Terselenggaranya layanan pertanahan yang profesional	Jumlah SDM yang telah mengikuti pelatihan dan pendidikan	2.630 orang	14.150 orang K)	47,1
B.5	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Pendidikan STPN (Prioritas Bidang)	Tersedianya sumberdaya manusia lulusan program Diploma, Pendidikan khusus, spesialis, S1, S2	Jumlah lulusan program Diploma, Pendidikan khusus, spesialis, S1, S2	20%	100%	12,1

KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN PERTANAHAN NASIONAL

NO	PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010- 2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
C	PROGRAM PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA					522,6
C.1	Pengelolaan Sarana dan Prasarana (pusat) (Prioritas Bidang)	Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana BPN RI	Pengembangan sarana prasarana pelayanan pertanahan	-	1 satker K)	3,5
C.2	Pengelolaan Sarana dan Prasarana (daerah) (Prioritas Bidang)	Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana Kanwil BPN Provinsi	Pengembangan sarana prasarana pelayanan pertanahan	25 satker	330 satker K)	519,1
D	PROGRAM PENGAWASAN DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS APARATUR BADAN PERTANAHAN NASIONAL					41,3
TOTAL ALOKASI BPN 2010-2014						17.137,9

K : Angka kumulatif 5 tahun (2010-2014)

**RENCANA TINDAK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH 2010-2014
PER KEMENTERIAN/LEMBAGA**

KEMENTERIAN/LEMBAGA : PERPUSTAKAAN NASIONAL

No	PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
1	Program Pengembangan Perpustakaan	Meningkatnya layanan perpustakaan, pelestarian fisik dan kandungan naskah kuno dan budaya gemar membaca di masyarakat	1 Jumlah pengunjung perpustakaan (juta)	4,4	23,3 ^{KJ}	1.345,4
			2 Jumlah koleksi perpustakaan nasional (juta)	1,8	2,2	
			3 Jumlah perpustakaan di Indonesia yang dikelola sesuai standar	42	100	
1.1	Pendidikan dan Pelatihan Perpustakaan	Meningkatnya kompetensi SDM perpustakaan	1 Jumlah peserta diklat perpustakaan	700	4.100 ^{KJ}	35,4
			2 Jumlah diklat yang diakreditasi dan dievaluasi	15	122 ^{KJ}	
1.2	Pengembangan Pustakawan	Meningkatnya kompetensi Pustakawan	1 Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat	-	464 ^{KJ}	26,1
			2 Jumlah pedoman dan standar kompetensi	10	50 ^{KJ}	
1.3	Pengembangan Koleksi Perpustakaan Nasional	Meningkatnya koleksi Perpustakaan Nasional	1 Jumlah penyediaan bahan pustaka (ribu)	131	708 ^{KJ}	105,7
			2 Jumlah pengolahan bahan pustaka (ribu)	75	435 ^{KJ}	
			3 Jumlah pedoman pengolahan bahan pustaka	14	74 ^{KJ}	
			4 Jumlah data bibliografi dan <i>authority</i> (ribu)	75	435 ^{KJ}	
			5 Jumlah perpustakaan di Indonesia yang dikelola sesuai standar	42	100	
1.4	Pengelolaan Deposit Terbitan Nasional	Meningkatnya pengelolaan dan pendayagunaan terbitan nasional hasil pelaksanaan UU Karya Cetak dan Karya Rekam	1 Jumlah terbitan nasional dan internasional yang terhimpun dan terkelola (ribu)	81,5	407,6 ^{KJ}	26,1
			2 Jumlah terbitan nasional yang terdata dalam Bibliografi Nasional (BNI) dan Katalog Induk Nasional (KIN) (ribu)	2,5	12,5 ^{KJ}	
			3 Jumlah judul buku terhimpun dalam Katalog Dalam Terbitan (KDT), International Standard Book Number (ISBN) dan International Serial Music Number (ISMN) (ribu)	2,5	12,5 ^{KJ}	
			4 Jumlah Sosialisasi Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (UU No.4 Tahun 1990)	5	25 ^{KJ}	

KEMENTERIAN/LEMBAGA : PERPUSTAKAAN NASIONAL

No	PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
1.5	Preservasi dan Konservasi Bahan Pustaka dan Naskah Kuno	Meningkatnya kualitas pengelolaan dan pelestarian fisik dan kandungan informasi bahan pustaka dan naskah kuno	1 Jumlah fisik dan kandungan informasi bahan pustaka serta naskah kuno yang dilestarikan (ribu)	157,7	230,8	55,4
			2 Jumlah naskah pedoman teknis preservasi bahan pustaka	15	75 ^{K)}	
			3 Intensitas sosialisasi preservasi bahan pustaka	2	14 ^{K)}	
1.6	Peningkatan Layanan Jasa Perpustakaan dan Informasi	Meningkatnya kegiatan layanan jasa perpustakaan dan informasi yang didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai	1 Jumlah perpustakaan provinsi yang memiliki perangkat perpustakaan digital (<i>e-library</i>)	33	33	212,2
			2 Jumlah Kab/Kota menjadi jejaring dan memiliki perangkat perpustakaan digital (<i>e-library</i>)	-	150 ^{K)}	
			3 Jumlah pemustaka yang memanfaatkan Perpustakaan (juta orang)	2,0	17,0 ^{K)}	
			4 Jumlah naskah kuno/manuskrip (di inventarisasi, di translasi, di transliterasi, dan di transmedia)-(%)	5	10	
1.7	Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Gemar Membaca	Meningkatnya upaya pengembangan perpustakaan dan budaya gemar membaca	1 Jumlah perpustakaan sesuai dengan standar/tipologi perpustakaan	-	350	843,9
			2 Jumlah pedoman dan standar perpustakaan	28	140 ^{K)}	
			3 Jumlah kajian perpustakaan dan pembudayaan gemar membaca	5	36 ^{K)}	
			4 Jumlah promosi pembudayaan gemar membaca	10	60 ^{K)}	
			5 Jumlah perpustakaan keliling (mobil, dan kapal)	88	220 ^{K)}	
			6 Jumlah perpustakaan umum yang dikembangkan:	2.283	11.133 ^{K)}	
			<i>a Provinsi</i>	33	33	
			<i>b Kabupaten/Kota</i>	250	350 ^{K)}	
			<i>c Desa/Kelurahan</i>	2.000	10.750 ^{K)}	
1.8	Pengelolaan Perpustakaan Proklamator	Meningkatnya kualitas penunjang layanan perpustakaan proklamator	1 Jumlah pengunjung perpustakaan Proklamator (ribu)	416,0	2.346,4 ^{K)}	40,6
			2 Jumlah koleksi perpustakaan Proklamator (ribu)	100,7	568,1 ^{K)}	
					0	

KEMENTERIAN/LEMBAGA : PERPUSTAKAAN NASIONAL

No	PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
2	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Taknis lainnya Perpustakaan Nasional	Meningkatnya kualitas pelayanan, pengelolaan, perencanaan dan pelaksanaan yang ditunjang oleh pembinaan adminstrasi dan keuangan perpustakaan nasional	1 Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran	36	180 ^{K)}	531,3
			2 Jumlah laporan keuangan yang sesuai dengan Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP)	34	170 ^{K)}	
			3 Jumlah Surat Keputusan dan dokumen kepegawaian	800	4.500 ^{K)}	
3	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Perpustakaan Nasional.	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana gedung dan operasional peralatan kantor di lingkungan Perpusnas	Jumlah sarana dan prasarana gedung dan operasional kantor di lingkungan Perpusnas yang terpelihara dengan baik (ribu m2)	38,8	38,8	9,9
TOTAL ALOKASI PERPUSTAKAAN NASIONAL 2010-2014						1.886,6

K : Angka kumulatif 5 tahun (2010-2014)

**RENCANA TINDAK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH 2010-2014
PER KEMENTERIAN/LEMBAGA**

KEMENTERIAN/LEMBAGA: KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NO	PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
I.	Program Pengelolaan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika *)	Pengelolaan sumber daya informatika yang optimal untuk mendukung pencapaian tingkat penetrasi internet 50%, layanan <i>broadband</i> 30%, dan siaran TV digital 35%	1. % pengelolaan sumber daya spektrum dan non spektrum	40%	100%	2.922,9
		Tumbuh kembangnya industri informatika yang layak secara teknis	2. Penggunaan alat dan perangkat telekomunikasi dalam negeri	10%	30%	
		Tercapainya standar kelayakan teknis dan kualitas layanan bertaraf internasional	3. % <i>compliance</i> terhadap standar kelayakan teknis dan kualitas layanan bertaraf internasional	40%	100%	
	Kegiatan Prioritas Nasional:					
1.1	Perencanaan dan rekayasa alokasi spektrum frekuensi	Kebijakan, regulasi, rencana pemanfaatan dan rekayasa sumber daya spektrum frekuensi radio	1. % jumlah penetapan pita frekuensi radio dan pemanfaatan slot orbit satelit	95%	95%	120,7
			2. % utilitas pemanfaatan spektrum frekuensi radio	40%	100%	
			3. % rencana pengalokasian spektrum frekuensi radio untuk <i>broadband wireless access</i>	100% (BWA 2,3 GHz nomadic)	100% (BWA 2,3 GHz nomadic) + 100% (BWA 2,3 GHz mobile) + 100% (BWA 3,3 GHz)	

KEMENTERIAN/LEMBAGA: KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NO	PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
			4. Ketersediaan spektrum frekuensi radio di 108 MHz untuk mendukung siaran TV digital	50% kota besar	100% kota besar ^{K)} + 50% selain kota besar	
1.2	Pelaksanaan layanan pemanfaatan sumber daya pos dan informatika	Kebijakan, regulasi, rencana optimalisasi sumber daya spektrum dan non spektrum	1. % pengelolaan sumber daya spektrum frekuensi radio dan orbit satelit	40%	100%	519,7
			2. % pengelolaan sumber daya pos, penomoran telekomunikasi dan alamat IP	40%	100%	
			3. % pengembangan sarana dan prasarana perizinan	5%	100%	
			4. % permohonan pelayanan spektrum yang diproses tepat waktu	5%	100%	
	Kegiatan Prioritas Bidang:					
1.3	Pengembangan standarisasi perangkat pos dan informatika	Kebijakan, regulasi, standar, sertifikasi, interoperabilitas perangkat pos, telekomunikasi dan penyiaran	1. % pencapaian standar kelayakan teknis perangkat pos, telekomunikasi dan penyiaran	40%	100%	65,4
			2. % peningkatan interoperabilitas pada layanan perangkat, aplikasi dan konten	40%	100%	
			3. Jumlah spesifikasi teknis alat dan perangkat pos dan telekomunikasi	10 paket	50 paket ^{K)}	
			4. Jumlah standarisasi perangkat penyiaran	4 paket	20 paket ^{K)}	
			5. Jumlah sertifikat alat dan perangkat telekomunikasi serta surat keterangan Uji Laik Operasi (ULO)	3750	4750 buah	
1.4	Pengembangan standarisasi layanan pos dan informatika	Kebijakan, regulasi, standar, sertifikasi, interoperabilitas layanan pos, telekomunikasi dan penyiaran	Paket penyusunan kebijakan, regulasi, sertifikasi di bidang layanan pos, telekomunikasi dan penyiaran	10 paket	50 paket ^{K)}	65,7

KEMENTERIAN/LEMBAGA: KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NO	PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
1.5	Pengendalian pemanfaatan sumber daya pos dan informatika	Kebijakan, regulasi dan penertiban dalam rangka meningkatkan kepatuhan penggunaan sumber daya spektrum dan non spektrum	1. % ketertiban dan kepatuhan pengguna sumber daya pos, telekomunikasi dan penyiaran	90%	90%	67,0
			2. % ketertiban dan kepatuhan terhadap penggunaan perangkat pos, telekomunikasi dan penyiaran yang sudah disertifikasi	90%	90%	
			3. % peningkatan pemahaman masyarakat terhadap pemanfaatan sumber daya pos, telekomunikasi dan informatika	90%	90%	
1.6	Pelaksanaan layanan pengujian dan kalibrasi perangkat pos dan informatika	Layanan pengujian dan kalibrasi perangkat pos, telekomunikasi dan penyiaran	% pencapaian kualitas pengujian perangkat pos, telekomunikasi dan penyiaran	90%	90%	145,2
1.7	Pelaksanaan monitoring, validasi dan penertiban pemanfaatan sumber daya pos dan informatika	Layanan monitor, validasi dan penertiban untuk meningkatkan kepatuhan terhadap penggunaan sumber daya spektrum frekuensi radio, orbit satelit, perangkat pos, telekomunikasi dan penyiaran	% penggunaan spektrum frekuensi radio yang mematuhi regulasi dan penyelesaian gangguan di bidang spektrum frekuensi radio, orbit satelit, perangkat pos, telekomunikasi dan penyiaran	70%	90%	1.216,8
II.	Program Penyelenggaraan Pos dan Informatika ^{*)}	Ketersediaan layanan pos dan informatika	% wilayah Indonesia yang dapat dilayani pos dan informatika	80%	100%	9.219,1
		Tingkat e-literasi	% e-literasi masyarakat dalam menggunakan sarana dan prasarana komunikasi dan informatika	30%	50%	
		Keamanan jaringan internet nasional	% keamanan trafik nasional termasuk titik akses ke lembaga pemerintahan dan critical infrastructure	50%	70%	
	Kegiatan Prioritas Nasional:					
2.1	Pengembangan penyelenggaraan pos	Kebijakan, regulasi, perijinan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas layanan pos	1. % penyelesaian penyusunan Peraturan Pelaksana UU No. 38 Tahun 2009 tentang Pos	60%	100%	57,3
			2. Jumlah kebijakan dan regulasi	6 paket	18 paket ^{ki)}	

KEMENTERIAN/LEMBAGA: KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NO	PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
			3. % verifikasi terhadap pelaksanaan program PSO	100%	100%	
			4. % pencapaian terhadap kuantitas dan kualitas layanan pos	60%	100%	
2.2	Pengembangan penyelenggaraan telekomunikasi	Kebijakan, regulasi, perijinan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas layanan telekomunikasi	1. Jumlah regulasi teknis infrastruktur menuju era konvergensi	10 paket	87 paket ^{KI}	85,6
			2. % pencapaian terhadap kualitas penyelenggaraan telekomunikasi dan pemanfaatan aplikasi teknologi telekomunikasi, informasi dan komunikasi	60%	100%	
			3. % pembahasan dan perbaikan materi RUU Multimedia (Konvergensi Telematika) sebagai pengganti UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi	20%	100%	
			4. % pencapaian terhadap kepastian hukum berdasarkan prinsip keadilan dan transparansi bagi pelaku industri telekomunikasi	60%	100%	
			5. % penyusunan dan pembahasan ICT Fund dan optimalisasi pemanfaatan PNB	100%	100%	
2.3	Pengembangan penyelenggaraan penyiaran	Kebijakan, regulasi, perijinan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas penyelenggaraan penyiaran	1. % pencapaian terhadap pembaharuan kebijakan regulasi dan kelembagaan akibat adanya digitalisasi dan perkembangan industri	60%	100%	498,9
			2. % pencapaian terhadap ketepatan penyelesaian layanan perijinan	50%	100%	
			3. % implementasi migrasi sistem penyiaran dari analog ke digital	10%	70%	
2.4	Pelaksanaan pemberdayaan dan pemerataan pembangunan sarana dan prasarana informatika	Layanan akses informasi dan komunikasi di wilayah non komersial	1. % desa yang dilayani akses telekomunikasi	100%	100%	7.367,1
			2. % desa yang dilayani akses internet	5%	80%	
			3. % ibukota provinsi yang terhubung dengan jaringan serat optik	10%	100%	

KEMENTERIAN/LEMBAGA: KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NO	PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
			4. % ibukota kab/kota yang terhubung secara <i>broadband</i>	25%	75%	
			5. % ibukota provinsi yang memiliki <i>regional internet exchange</i>	10%	100%	
			6. % ibukota provinsi yang memiliki <i>international internet exchange</i>	10%	100%	
			7. Jumlah Desa Informasi yang dilengkapi radio komunitas	15 desa	500 desa	
2.5	Pelaksanaan pengamanan jaringan internet	Keamanan terhadap jaringan internet nasional	1. % pencapaian terhadap keamanan trafik nasional, POP penyelenggara jasa internet dan internet exchange, titik akses ke lembaga pemerintahan dan <i>critical infrastructure</i>	50%	70%	116,2
			2. % pencapaian terhadap kemampuan data center dalam mengelola integritas, kerahasiaan dan kemandirian data hasil pemantauan, pendeteksian dini, log file serta penyelenggara yang mengirimkan rekaman transaksi dan dukungan terhadap penegakan hukum	50%	70%	
	Kegiatan Prioritas Bidang:					
2.6	Pengembangan pentarifan dan interkoneksi	Kebijakan, regulasi, bimbingan teknis dan evaluasi bidang penyelenggaraan tarif dan interkoneksi	1. % pencapaian terhadap keterjangkauan tarif layanan telekomunikasi, penerapan interkoneksi berbasis NGN/konvergensi, dan pengembangan teknologi telekomunikasi, informasi dan komunikasi	60%	100%	62,2
			2. % evaluasi dokumen interkoneksi	100%	100%	
			3. % persiapan migrasi jaringan teknologi berbasis protokol internet (IP)	20%	100%	

KEMENTERIAN/LEMBAGA: KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NO	PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
2.7	Pengendalian penyelenggaraan pos dan informatika	Kebijakan, regulasi, dan penertiban untuk meningkatkan kepatuhan penyelenggaraan pos, telekomunikasi dan penyiaran	1. % penyelesaian pelanggaran kepatuhan 2. % pencapaian terhadap penyelenggaraan pos, telekomunikasi, penyiaran dan pengembangan dan pemerataan pembangunan untuk peningkatan kuantitas dan kualitas layanan	100% 60%	100% 100%	60,4
III.	Program Pengembangan Aplikasi Informatika ^{*)}	Perluasan penerapan dan peningkatan kualitas layanan aplikasi e-government Layanan e-bisnis untuk UKM Sistem pengamanan elektronik Penyelenggara layanan sistem elektronik	Nilai rata-rata e-Government nasional % penerapan aplikasi e-bisnis di komunitas UKM % jumlah penyelenggara sistem pengamanan elektronik yang memenuhi kebutuhan masyarakat % penyelenggara layanan sistem elektronik telah disertifikasi	2,6 10% 10% 10%	3,4 100% 100% 100%	1.530,4
	Kegiatan Prioritas Nasional:					
3.1	Fasilitasi penerapan dan pengembangan e-government	Kebijakan, regulasi, bimbingan teknis, dan evaluasi pengembangan e-government untuk mendorong peningkatan nilai e-government nasional menjadi 3,4, pencapaian tingkat e-literasi menjadi 50%	1. % penyusunan dan pembahasan RPP Penyelenggaraan Sistem Elektronik Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah (e-Government) dan Master Plan e-Government Nasional 2. % peningkatan penerapan dan kualitas aplikasi e-government di pemerintah kab/kota 3. Jumlah sekolah di 5 kab/kota DIY yang memiliki sistem e-learning (PHLN Utilization of ICT for Education Quality Enhancement)	100% 10% 50 sekolah	100% 100% 500 sekolah ^{K)}	877,9
3.2	Fasilitasi penerapan dan pengembangan e-bisnis	Kebijakan, regulasi, bimbingan teknis, dan evaluasi pengembangan e-bisnis	1. % peningkatan penerapan dan kualitas aplikasi e-bisnis di komunitas UKM 2. Jumlah pusat layanan e-bisnis	10% 4 paket	100% 25 paket ^{K)}	111,1

KEMENTERIAN/LEMBAGA: KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NO	PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
3.3	Fasilitasi penerapan dan pengembangan sistem keamanan informasi elektronik	Kebijakan, regulasi, bimbingan teknis, dan evaluasi pengembangan sistem keamanan informasi elektronik	1. % pembahasan dan perbaikan materi RUU Ratifikasi <i>Convention of Cyber Crime</i>	50%	100%	120,4
			2. % pembahasan dan perbaikan materi RUU Tindak Pidana Teknologi Informasi (<i>Cyber Crime</i>)	50%	100%	
			3. % penyusunan RPP pelaksana UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	100%	100%	
			4. % penyelenggara sistem pengamanan elektronik dapat memenuhi kebutuhan masyarakat	10%	100%	
3.4	Pengembangan sertifikasi sistem elektronik jasa aplikasi dan konten	Kebijakan, regulasi, bimbingan teknis, dan evaluasi pengembangan sertifikasi sistem elektronik, jasa aplikasi, dan konten	1. % pengembangan, penerapan, pemanfaatan dan penguasaan perangkat lunak <i>open source</i>	10%	30%	120,7
			2. % penyelenggara layanan sistem elektronik telah dapat disertifikasi	10%	100%	
			3. Sistem informasi layanan pekerja migran	10 paket	24 paket serta ^{KJ} operasional dan pemeliharaan	
	Kegiatan Prioritas Bidang:					
3.5	Pengembangan promosi dan kemitraan telematika	Promosi TIK untuk mendorong kompetisi dan kesadaran masyarakat akan pentingnya TIK dalam rangka pencapaian tingkat e-literasi sebesar 50%	Jumlah peserta bimbingan teknis sebagai <i>agent of change</i> untuk peningkatan e-literasi di masyarakat	1000 orang	5000 orang ^{KJ}	104,0
			Pemanfaatan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi melalui pemberdayaan masyarakat	1. % masyarakat yang menjadi target wilayah <i>community access point</i> (CAP) memanfaatkan fasilitas CAP	60%	
		2. % komunitas komunikasi dan informatika telah mampu mengembangkan kreativitas, inovasi dan kearifan lokal		10%	100%	

KEMENTERIAN/LEMBAGA: KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NO	PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
IV.	Program Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Komunikasi dan Informatika	Karya riset menjadi acuan penyusunan kebijakan publik bidang komunikasi dan informatika	% jumlah kebijakan publik bidang komunikasi dan informatika yang berbasis pada hasil penelitian litbang	50%	100%	1.365,1
	INFRASTRUKTUR					
	Kegiatan Prioritas Bidang:					
4.1	Pelaksanaan pelatihan dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatnya e-literasi	Jumlah peserta diklat Teknologi Informasi dan Komunikasi di ICT Training Center Jababeka dan UIN Syarif Hidayatullah (NICT HRD)	3000 orang	27000 orang ^{KJ}	172,5
	Kegiatan Prioritas KL:					
4.2	Pelaksanaan penelitian dan pengembangan sumber daya dan perangkat pos dan informatika	Hasil penelitian dan pengembangan sumber daya dan standarisasi informatika	% kebijakan/regulasi bidang pengelolaan sumber daya dan standarisasi pos dan informatika yang berbasis pada rekomendasi hasil litbang	50%	100%	58,5
4.3	Pelaksanaan penelitian dan pengembangan penyelenggaraan pos dan informatika	Hasil penelitian dan pengembangan penyelenggaraan pos dan informatika	% kebijakan/regulasi bidang penyelenggaraan pos dan informatika yang berbasis pada rekomendasi hasil litbang	50%	100%	58,5
	POLITIK DAN KOMUNIKASI					
4.4	Penelitian dan pengembangan aplikasi informatika dan informasi publik	Terlaksananya penelitian dan pengembangan aplikasi informatika dan informasi publik	1. Jumlah karya riset bidang aplikasi informatika dan informasi publik	10 paket	50 paket ^{KJ}	50,5
			2. % pemanfaatan karya riset bidang aplikasi informatika dan informasi publik untuk penyusunan kebijakan/regulasi di bidang kominfo	15%	35%	
4.5	Penelitian dan pengembangan literasi dan profesi	Mendorong tumbuhnya iklim penelitian dan pengembangan bidang komunikasi dan informatika serta terbangunnya sumber daya manusia unggul di bidang komunikasi dan informatika	1. Jumlah karya riset bidang literasi dan profesi	10	50 ^{KJ}	331,5
			2. % pemanfaatan karya riset bidang literasi dan profesi untuk penyusunan kebijakan/regulasi di bidang kominfo	15%	35%	
			3. Jumlah peserta Bimtek CIO	524	2524 ^{KJ}	
			4. Jumlah peserta Bimtek Budaya dokumentasi	1048	3048 ^{KJ}	
			5. Jumlah peserta pelatihan komunikasi publik	1025	3025 ^{KJ}	

KEMENTERIAN/LEMBAGA: KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NO	PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
			6. Jumlah penerima beasiswa S2/S3 dalam dan luar negeri	198	1398 ^{KJ}	
			7. Jumlah paket standar kompetensi kerja bidang kominfo	2	42 ^{KJ}	
			8. Jumlah SDM Kominfo yang bersertifikasi	80	4980 ^{KJ}	
V	Program Pengembangan Informasi dan Komunikasi Publik	Meningkatnya penyebaran, pemerataan, dan pemanfaatan informasi publik	1. % Konten informasi yang diterima, dimanfaatkan dan dikembangkan oleh pemda dan lembaga sosial	65%	90%	1.483,2
			2. % Akses aparatur pemda dan masyarakat terhadap media center	30%	70%	
			3. Indeks kebebasan pers di Indonesia	2	2	
			4. % Peningkatan pemanfaatan media publik oleh masyarakat	20%	40%	
			5. % Konten yang disediakan oleh pemerintah yang sesuai dengan kearifan lokal	75%	90%	
			6. % Kerjasama dengan lembaga kemasyarakatan yang dilaksanakan secara efektif dan efisien	70%	90%	
5.1	Penyediaan dan pengelolaan informasi	Tersedianya konten informasi publik yang beragam dan berkualitas yang bersifat mendidik, mencerahkan, dan memberdayakan masyarakat dalam rangka NKRI	1. <i>Dokumen Grand design</i> pengelolaan konten dan strategi penyebaran informasi	0	1	62,7
			2. <i>Dokumen database</i> nasional, sektoral dan regional mengenai informasi publik	3 paket	15 paket ^{KJ}	
			3. % Paket konten informasi publik yang siap pakai dan dimanfaatkan oleh pemda	65%	80%	
			4. Jumlah aktivitas untuk peningkatan citizen journalism	5 kali	25 kali ^{KJ}	

KEMENTERIAN/LEMBAGA: KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NO	PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
5.2	Kegiatan penyebaran/diseminasi informasi publik	Terlaksananya penyebaran/diseminasi informasi publik	1. Jumlah dokumen <i>Grand Design Media Centre</i>	1	1	87,1
			2. Jumlah <i>media center</i> yang diperkuat di provinsi/kabupaten/kota	75 bimtek	75 bimtek dan 60 ^{KJ} penguatan <i>media center</i>	
			3. Jumlah <i>media center</i> lengkap dan berfungsi sesuai standar di provinsi/kabupaten/kota di daerah terluar/terdepan/pasca konflik	0	60 <i>media center</i> ^{KJ}	
			4. % Jumlah kerja sama dengan lembaga multilateral, bilateral dan regional yang efektif	65%	85%	
			5. % Aktivitas penyebaran informasi publik langsung ke masyarakat sesuai rencana	60%	80%	
5.3	Pengembangan kebijakan komunikasi nasional	Terselenggaranya pengembangan kebijakan komunikasi nasional	1. % Kebijakan, regulasi dan standarisasi di bidang komunikasi dan informasi publik untuk mendukung masyarakat informasi	70%	90%	20,9
			2. % Laporan pemantauan dan analisis pelaksanaan kebijakan dan regulasi bidang komunikasi dan informasi yang tepat waktu dan dimanfaatkan oleh pimpinan	65%	85%	
5.4	Peningkatan peran media publik dalam pengembangan komunikasi dan informasi Nasional	Terlaksananya peningkatan peran media publik	1. Jumlah aktivitas penguatan lembaga/media publik	5 paket	25 paket ^{KJ}	69,7
			2. Jumlah koordinasi dengan lembaga penyiaran publik TVRI, RRI dan LKBN Antara	12 kali	60 kali ^{KJ}	

KEMENTERIAN/LEMBAGA: KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NO	PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
5.5	Pengembangan kemitraan lembaga komunikasi	Terselenggaranya pengembangan kemitraan lembaga komunikasi	1. % Aktivitas peningkatan peran organisasi kemasyarakatan sebagai penyebar informasi (KIM, media tradisional, media komunitas) di wilayah perbatasan dan daerah tertinggal yang dilaksanakan tepat waktu	60%	80%	297,5
			2. % Aktivitas yang efektif untuk mendorong <i>media literasi</i>	60%	80%	
			3. % fasilitasi penyebaran informasi publik melalui media kemasyarakatan yang tepat waktu dan akuntabel	70%	90%	
5.6	Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya Komisi Informasi (KI) Pusat	Tersedianya dukungan teknis dan manajemen dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Komisi Informasi (KI) Pusat	1. % pengaduan perselisihan masalah informasi publik yang terselesaikan	70%	90%	34,5
			2. % lembaga publik yang melaksanakan kode etik keterbukaan Informasi Publik	70%	90%	
			3. Jumlah kegiatan pelaksanaan program pengembangan peran Komisi Informasi Pusat	12 paket	60 paket ^{K3}	
VI	Program Dukungan Manajemen dan Layanan Teknis Lainnya	Meningkatnya kualitas pelayanan teknis dan administrasi	1. % rumusan renstra dan rencana kerja yang memiliki sasaran dan target yang jelas dan terukur	82,5%	90%	1.493,5
			2. % realisasi rencana program/kegiatan yang dapat dilaksanakan tepat waktu dan sesuai rencana	82,5%	90%	
			3. Tingkat kepuasan layanan teknis dan administrasi	60%	80%	
			4. % standar kompetensi jabatan/individu yang dilaksanakan	60%	80%	
			5. % pola karier pegawai yang dilaksanakan	60%	80%	

KEMENTERIAN/LEMBAGA: KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NO	PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
VII	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Memadainya sarana dan prasarana aparatur	Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana aparatur	60%	80%	91,0
VIII	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur	Meningkatnya akuntabilitas aparatur Kominfo	1. Opini hasil audit BPK	WTP	WTP	145,0
			2. % Laporan yang tepat waktu	70%	90%	
			3. % rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti	70%	90%	
TOTAL ALOKASI KEMENKOMINFO						18.250,2

K : Angka kumulatif 5 tahun (2010-2014)

*** CATATAN**

Program inti bidang infrastruktur

**RENCANA TINDAK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH 2010-2014
PER KEMENTERIAN/LEMBAGA**

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEPOLISIAN RI

NO	PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
1	Program Dukungan Manajemen & Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Polri	Menyelenggarakan fungsi Manajemen kinerja Polri secara optimal dengan melaksanakan Kegiatan Perencanaan, Pelaksanaan, Pengendalian, Pelaporan, Pelayanan Internal dan pembayaran gaji yang di laksanakan secara tepat waktu, akuntabel dan terintegrasi antara	a. Jumlah kebijakan yang dapat mengoptimalkan unit kerja pelaksana teknis (paket)	5 Paket	50 K)	98.757,7
			b. % kebijakan yang berpihak pada masyarakat	0,55	1	
			c. % Jumlah aparatur yang dikelola pengembangan karirnya yang diberikan penghargaan/sanksi sesuai kinerjanya	0,6	0,95	
			d. % perencanaan dan penganggaran berdasarkan kerangka pengeluaran jangka menengah dengan kinerja secara terpadu	0,9	1	
			e. % pengelolaan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	0,8	1	
			f. % unit kerja yang menerapkan administrasi secara akuntabel	0,65	1	
			g. % peraturan Kapolri yang selaras di tingkat Mabes dan Kewilayahan.	0,75	1	
a	Penyelenggaraan Administrasi Perawatan Personel Polri	Tercapainya tata kelola admistrasi tentang kinerja dan anggaran Polri yang akuntabel	Terselenggaranya hak gaji dan tunjangan anggota dan PNS Polri (belum TERMASUK RENUMERASI 50% MULAI 2010)	100%	100%	93.217,7
2	Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Polri	Mewujudkan aparat Polri yang Profesional, Proporsional dan Akuntabel sebagai implementasi reformasi Polri khususnya perubahan kultur	a. % hasil pemeriksaan yang telah ditindaklanjuti.	50%	52%	354,0
			b. % tindak lanjut terhadap pengaduan masyarakat.	55%	57%	
			c. % penurunan anggota Polri yang melakukan pelanggaran.	2%	4%	

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEPOLISIAN RI

NO	PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
a	Pembinaan Profesi	Terseleenggaranya disiplin internal anggota polri	% tindak lanjut terhadap pengaduan masyarakat.	55%	58%	42,2
b	Pembinaan Pengamanan Internal	Terpeliharanya keamanan internal Polri	% Prosentase Kegiatan Penyelidikan Dalam Pengungkapan Kasus-Kasus Dugaan Pelanggaran Dan Pelanggaran Personel Polri.	70%	73%	80,7
c	Penyelenggaraan Komisi Kepolisian Nasional	Meningkatnya kualitas penyusunan kebijakan dan partisipasi masyarakat	% Jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti	20%	23%	61,9
3	Program Peningkatan Sarana Prasarana Polri.	Mendukung tugas pembinaan dan operasional Polri melalui ketersediaan sarana dan prasarana materiil, fasilitas dan jasa baik kualitas maupun kuantitas.	Prosentase/jml kecukupan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung fasilitas guna memenuhi Standar Pelayanan Kamtibmas Prima.	60%	61%	18.553,9
a	Pengembangan Alut dan Alsus Harkamtibmas	Mengaplikasikan teknologi dan peralatan harkamtibmas dengan efektif dan efisien	% Kondisi ketersediaan Alut Harkamtibmas terhadap standar	60%	61%	411,0
b	Pengembangan Alut dan Alsus Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana	Mengaplikasikan teknologi dan peralatan penyelidikan dan penyidikan dengan efektif dan efisien	% Kondisi ketersediaan Alut Lidik Sidik terhadap standar	35%	36%	289,8
c	Pengembangan Alut dan Alsus Strategi Keamanan	Mengaplikasikan teknologi dan peralatan strategi keamanan dengan efektif dan efisien	% Kondisi ketersediaan Alut Strategi Keamanan terhadap standar	50%	51%	210,8
d	Pengembangan Alut dan Alsus Penanggulangan Keamanan Berkadar Tinggi	Mengaplikasikan teknologi dan peralatan penanggulangan keamanan dalam negeri dengan efektif dan efisien	% Kondisi ketersediaan Alut Penanggulangan Kamdagri terhadap standar	60%	61%	302,5
e	Pengembangan Alut Komunikasi dan Telematika	Mengaplikasikan teknologi dan peralatan komunikasi dan telematika kepolisian dengan efektif dan efisien	% Kondisi ketersediaan Alut Telekomunikasi dan Telematika terhadap standar	50%	51%	1,3
f	Pengembangan Alut dan Alsus Kepolisian Strategis	Percepatan modernisasi Alut Polri	% Pencapaian postur pelayanan kepolisian modern menurut Standar Yan Kam Prima	40%	41%	13.149,1
g	Pengadaan Materiil dan Sarana Prasarana Perbatasan	Mendukung pelayanan keamanan di daerah perbatasan	Jumlah materiil pos Polri di daerah perbatasan dan pulau terluar (pos)	20	100 K)	15,5
h.	Pengembangan Alut Kepolisian Produksi Dalam Negeri	Meningkatkan kemandirian alut Polri produksi dalam negeri	Jumlah dan jenis peralatan utama dan peralatan teknis Polri yang memenuhi standar keamanan internasional.	20%	25%	1.000,0

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEPOLISIAN RI

NO	PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
4	Program Penelitian dan Pengembangan Teknologi Kepolisian	Menyelenggarakan pengkajian, penelitian dan pengembangan yang berhubungan dengan tehnologi Kepolisian untuk mendukung tugas kepolisian agar memenuhi	a. Presentase kebijakan penggunaan peralatan Polri yang berbasis pada nilai-nilai penegakan hukum dan HAM.	20%	22%	72,2
		standar peralatan utama dan peralatan teknis Polri yang terjangkau oleh produksi dalam negeri.	b. Jumlah dan jenis peralatan utama dan peralatan teknis Polri yang memenuhi standar keamanan internasional yang dilaksanakan oleh Balai Perintis Tehnologi Kepolisian	40%	42%	
a	Pembuatan Prototype	Meningkatkan Kemandirian Polri dalam memberikan yanmas	Jumlah Prototype yang dihasilkan	5 Prot	22 Prot K)	20,0
5	Program Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Polri	Memberdayakan SDM Polri di bidang pengembangan karier, pembinaan rohani hingga pengakhiran dinas secara proposional sesuai standar kompetensi.	a. Jumlah pengembangan kekuatan SDM Polri sesuai rasio Polri dengan jumlah penduduk yang ideal.	1:600	1:600	965,5
			b. Berkurangnya personel Polri yang melakukan penyimpangan dalam melayani masyarakat.	2%	1%	
a	Pengembangan kekuatan personel Polri	Menyelenggarakan pendidikan pembentukan peronsel polri baik perwira maupun bintanga	Jumlah Pendidikan Pembentukan Akpol, PPSS, Brigadir (orang)	3350	41250 K)	907,8
6	Program Pendidikan dan latihan Polri	Mewujudkan aparaturn Polri yang profesional baik dari segi kualitas maupun kuantitas dan memiliki kompetensi sesuai dengan bidang tugasnya melalui penyelenggaraan pendidikan Polri sehingga mampu mengemban tugas Polri secara profesional proposional.	a. Jumlah Gadik-Gadikan dan peserta Diklat POLRI yang memenuhi standar kompetensi melalui Uji kompetensi (orang)	15216	76080 K)	555,7
			b. Jumlah Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri terakreditasi	100%	100%	
			c. Standar pelayanan pendidikan dan pelatihan Polri	100%	100%	
a	Pendidikan Puskdiklat-Polwan-	Mencetak personel kompeten Polri sesuai lingkup profesi-spesialisasi	Jumlah Pendidikan Puskdiklat-Polwan-Selabrib-Intelkam-Reskrim-Gasum-Lantas-Brimob	12906	64530 K)	223,0
	Selabrib-Intelkam-Reskrim-Gasum-Lantas-Brimob					89,2

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEPOLISIAN RI

NO	PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
7	Program Pengembangan Strategi Keamanan dan Ketertiban	Mengembangkan langkah – langkah strategi, dan mencegah suatu potensi gangguan keamanan baik kualitas maupun kuantitas, sampai kepada penanggulangan sumber penyebab kejahatan, ketertiban dan konflik di masyarakat dan sektor sosial, politik dan ekonomi sehingga gangguan kamtibmas menurun.	a. Jumlah Kegiatan Intelijen yang dapat menurunkan potensi gangguan keamanan dalam negeri (paket gabungan)	480	2400 K)	396,9
			b. Jumlah masyarakat yang dijadikan jaringan informasi bidang Ipoleksusbudhankam			
			c. Jumlah Informasi Pencegahan kejahatan berkadat tinggi			
			d. Jumlah produk intelijen yang dihasilkan			
			e. Jumlah laporan potensi gangguan keamanan yang dapat diidentifikasi			
a	Penyelenggaraan Strategi Keamanan dan Ketertiban I	Menurunnya potensi kejahatan berkadat ancaman tinggi	Jumlah operasi pencegahan potensi kejahatan berkadat tinggi bidang Politik (paket)	30	150 K)	22,5
8	Program Kerjasama Keamanan dan Ketertiban	Memperluas kerja sama bidang keamanan, pendidikan dan pelatihan dengan kementerian/ lembaga baik dalam maupun luar negeri.	a. Jumlah Kerjama dengan derpatemen/instansi terpusat dan daerah (paket)	12	60 K)	166,5
			b. Jumlah Kerjssama dengan lembaga kepolisian di Luar Negeri (paket)	8	40 K)	
			c. Jumlah kerjasama keamanan dengan komponen masyarakat. (paket)	4	20 K)	
9	Program Pemberdayaan Potensi Keamanan.	Mendekatkan Polisi dengan berbagai komunitas masyarakat agar terdorong bekerja sama dengan Kepolisian secara proaktif dan saling mengandalkan untuk membantu tugas Kepolisian dalam menciptakan keamanan dan ketertiban bersama (Community Policing).	a. Jumlah anggota Polmas yang telah mendapatkan pelatihan Polmas. (orang)	41000	250260 K)	894,9
			b. Jumlah masyarakat dan kelompok masyarakat yang sadar dan peduli keamanan.			
			c. Jumlah kerjasama keamanan dengan komponen masyarakat.			
a.	Pembinaan forum kemitraan Polisi dan Masyarakat	Meningkatny jumlah forum kemitraan Polisi dan msyarakat	Jumlah Forum Kemitraan Polmas (orang)	41000	250260 K)	824,5

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEPOLISIAN RI

NO	PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
10	Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban masyarakat	Memelihara dan meningkatkan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat agar mampu melindungi seluruh warga masyarakat Indonesia dalam beraktifitas untuk meningkatkan kualitas hidup yang bebas dari bahaya, ancaman dan gangguan yang dapat menimbulkan cedera kerugian serta korban akibat gangguan keamanan dimaksud.	a. Jumlah Kriminalitas yang dapat ditindak oleh fungsi babinkam Polri	80%	95%	18.536,2
			b. Jumlah kegiatan pengaturan penjagaan patroli dan pengawalan di jalan raya			
			c. Jumlah Patroli perairan dan udara di seluruh wilayah hukum RI			
			d. Jumlah pengamanan objek vital/objek vital nasional dan VVIP.			
			e. Jumlah Patroli di tempat-tempat wisata dan melibatkan satwa anjing dan kuda			
			f. Jumlah Pengamanan pada pesta demokrasi lima tahunan pemilihan presiden / wakil, legislatif biak tingkat pusat maupun daerah			
a	Peningkatan Kualitas Layanan Publik LLAJ	Meningkatnya pelayanan SIM, STNK, BPKB & Terbangunnya Pusat Pengendali dan Informasi LLAJ	% Kecukupan jumlah pelayanan SSB per tahun	50%	100%	4.862,6
b	Pembinaan Kepolisian Perairan	Meningkatkan keamanan perairan pantai dan sungai; Terpeliharanya peralatan dan pendukungnya hingga siap pakai	Jumlah prosentase gangguan keamanan yang menurun pada jalur aktivitas masyarakat yg menggunakan moda transportasi laut .	10%	11%	71,7
c	Bina Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Kewilayahan	Meningkatnya kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah tempat tinggalnya	% Kecukupan Jumlah operasi Kepolisian yg menjadi prioritas kebutuhan masyarakat.	45%	46%	10.019,9

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEPOLISIAN RI

NO	PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
11	Program Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana	Menanggulangi dan menurunnya penyelesaian jenis kejahatan (kejahatan konvensional, kejahatan transnasional, kejahatan yang berimplikasi kontinjensi dan kejahatan terhadap kekayaan negara) tanpa melanggar HAM	a. Prosentase pengungkapan tindak pidana konvensional.	64,08%	66,00%	3.072,9
			b. Prosentase pengungkapan tindak pidana transnasional.	40%	55%	
			c. Prosentase pengungkapan tindak pidana terhadap kekayaan negara,	40%	55%	
			d. Prosentase peningkatan pengungkapan tindak pidana yg berimplikasi kontinjensi.	100%	100%	
			e. Jumlah pembinaan teknis penyidikan dan penyelidikan yang dilaksanakan. (paket)	77	520 K)	
			f. Jumlah bentuk-bentuk kerjasama di bidang penyidikan dan penegakan hukum secara umum. (paket)	45	305 K)	
a	Penindakan Tindak Pidana Umum	Meningkatnya penyelesaian penanganan perkara Tindak Pidana Umum	Jumlah Perkara dan Clearance Rate Tindak Pidana Umum tingkat Nasional	64%	67%	53,4
b	Penindakan Tindak Pidana Terorisme	Meningkatnya penyelesaian penanganan perkara Terorisme	Jumlah Perkara dan Clearance Rate Tindak Pidana Terorisme tingkat Nasional	100%	103%	59,7
c	Penindakan Tindak Pidana Narkoba	Meningkatnya penyelesaian penanganan perkara Tindak Pidana Narkoba	Jumlah Perkara dan Clearance Rate Tindak Pidana Narkoba tingkat Nasional	85%	88%	45,5
d	Penindakan Tindak Pidana Ekonomi Khusus	Meningkatnya penyelesaian penanganan perkara Tindak Pidana Ekonomi	Jumlah Perkara dan Clearance Rate Tindak Pidana Ekonomi Khusus tingkat Nasional	34%	37%	53,4
e	Penindakan Tindak Pidana Korupsi	Meningkatnya penyelesaian penanganan perkara Tindak Pidana Korupsi	Jumlah Perkara dan Clearance Rate Tindak Pidana Korupsi tingkat Nasional	0%	3%	8,5
f	Penindakan Tindak Pidana Kontinjensi	Meningkatnya penyelesaian penanganan perkara Tindak Pidana Kontinjensi	Jumlah Perkara dan Clearance Rate Tindak Pidana Kontinjensi tingkat Nasional	100%	103%	26,7
g	Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Kewilayahan	Meningkatnya Clearance Rate Tindak Pidana di tingkat masyarakat	Jumlah Perkara dan Clearance Rate Seluruh Tindak Pidana di wilayah Polda	55%	58%	2.697,6

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEPOLISIAN RI

NO	PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
12	Program Penanggulangan Gangguan Keamanan Dalam Negeri Berkadar Tinggi	Menanggulangi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat berkadar tinggi,	a. Jumlah Efisiensi, pelaksanaan mobilisasi pasukan bersenjata	60%	62%	282,1
		kerusuhan massa, kejahatan terorganisir bersenjata api dan bahan peledak.	b. Prosentase kemampuan fungsi brimob merata di seluruh satuan brimob pusat dan daerah	65%	67%	
			c. Prosentase modernisasi sistem peralatan utama dan peralatan khusus yang mendukung penanggulangan keamanan berkadar tinggi	65%	67%	
a	Latihan dan Penyiapan Personil Penanggulangan Keamanan Dalam Negeri	Tersiapkannya kemampuan pemukul penanggulangan keamanan dalam negeri	Jumlah kegiatan latihan personel brimob dalam penanggulangan keamanan dalam negeri	1/hari	1/hari	4,3
13	Program Pengembangan Hukum Kepolisian	Menyelenggarakan pembinaan dan advokasi hukum serta membangun landasan hukum dalam rangka pelaksanaan tugas pokok Polri selaku pelindung, pengayoman dan pelayanan	a. Jumlah penyusunan dan pengkajian perundang-undangan (paket)	5	25 K)	100,9
		masyarakat, memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat serta menegakkan hukum.	b. Jumlah Bantuan hukum/saksi/Penterjemah/ biaya pengacara/penyelesaian hukum (paket)	55	275 K)	
			c. Jumlah pendapat dan saran hukum yang akan dibuat (paket)	14	70 K)	
			d. Jumlah penyuluhan hukum yang dilaksanakan (paket)	30	159 K)	
TOTAL ALOKASI POLRI 2010-2014						142.709,5

K : Angka kumulatif 5 tahun (2010-2014)

**RENCANA TINDAK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH 2010-2014
PER KEMENTERIAN/LEMBAGA**

KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN (BPOM)

NO	PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Milyar)
				2010	2014	
1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPOM	Meningkatnya koordinasi perencanaan pembinaan, pengendalian terhadap program, administrasi dan sumber daya di lingkungan BPOM sesuai dengan standar sistem manajemen mutu	1. Persentase unit kerja yang menerapkan <i>quality policy</i>	10	30	1.780,7
			2. Persentase unit kerja yang terintegrasi secara <i>online</i>	70	80	
1.1	Pelayanan Informasi Obat dan Makanan, Informasi Keracunan dan Teknologi Informasi	Berfungsinya sistem informasi yang terintegrasi secara <i>online dan up to date</i> dalam pengawasan obat dan makanan	Persentase tersedianya <i>baseline</i> data pengawasan Obat dan Makanan	0	100 ¹⁾	80,2
1.2	Pengembangan Tenaga dan Manajemen Pengawasan Obat dan Makanan	Terselenggaranya pengembangan tenaga dan manajemen pengawasan Obat dan Makanan	Jumlah pegawai Badan POM yang ditingkatkan pendidikannya S2 dan S3	0	384 ^{k)}	615,9
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPOM	Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Badan POM	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana penunjang kinerja	60	95	204,3
2.1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPOM	Terselenggaranya pengadaan sarana dan prasarana aparatur Badan POM	Jumlah sarana dan prasarana yang diadakan sesuai kebutuhan	2	10 ^{k)}	68,8
3	Program Pengawasan Obat dan Makanan	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Obat dan Makanan dalam rangka Melindungi Masyarakat	1. Proporsi Obat yang memenuhi standar (aman, manfaat dan mutu)	99,23	99,63	2.146,3
			2. Proporsi makanan yang memenuhi syarat	75	90	

KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN (BPOM)

NO	PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Milyar)
				2010	2014	
3.1	Pengawasan Produksi Produk Terapeutik dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT)	Meningkatnya Mutu Sarana Produksi Produk Terapeutik dan PKRT sesuai <i>Good Manufacturing Practice</i> (GMP) terkini	Persentase sarana produksi obat yang memiliki sertifikasi GMP yang terkini	60	85	32,6
3.2	Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya	Menurunnya makanan yang mengandung bahan berbahaya	Persentase makanan yang mengandung cemaran bahan berbahaya/dilarang	25	10	15,7
3.3	Pengawasan Obat dan Makanan di 31 Balai Besar/Balai POM	Meningkatnya kinerja pengawasan obat dan makanan di seluruh Indonesia	1. Jumlah sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan yang diperiksa	15.000	76.516 ^{k)}	1.619,8
			2. Jumlah produk Obat dan Makanan yang disampel dan diuji	97.000	494.798 ^{k)}	
3.4	Pemeriksaan secara Laboratorium, Pengujian dan Penilaian Keamanan, Manfaat dan Mutu Obat dan Makanan serta Pembinaan Laboratorium POM	Meningkatnya kemampuan uji laboratorium POM sesuai standar	Persentase Laboratorium Balai POM yang terakreditasi secara konsisten sesuai standar	84	100	194,3
3.5	Standardisasi Produk Terapeutik dan PKRT	Tersusunnya standar, pedoman dan kriteria Produk Terapeutik dan PKRT yang mampu menjamin aman, bermanfaat dan bermutu	Persentase kecukupan standar Obat yang dimiliki dengan yang dibutuhkan	20	94	16,8
TOTAL ALOKASI BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN 2010-2014						4.131,3

Keterangan :

¹⁾ Target tercapai pada tahun 2011

^{k)} Target akumulatif 5 tahun

**RENCANA TINDAK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH 2010-2014
PER KEMENTERIAN/LEMBAGA**

KEMENTERIAN/LEMBAGA : LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL

NO	PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
1.	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Lemhannas	Meningkatkan kelancaran dan kecukupan dukungan pelaksanaan tugas dan operasional Lemhanas	a. % terlaksananya kegiatan yang direncanakan	75%	77%	592,7
			b. % laporan aset Lemhannas yang dinilai wajar	100%	102%	
			c. Tingkat kecepatan rata-rata penyelesaian urusan tata usaha untuk Gubernur, Settama, Kedeputian dan Inspektorat	80%	82%	
			d. Jumlah berita negatif dibanding total pemberitaan	80%	82%	
			e. Rasio antara jumlah PC yang terhubung dengan jaringan per jumlah pegawai	80%	82%	
2.	Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Lemhanas	Meningkatnya akuntabilitas pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Lemhanas	% jumlah laporan pengaduan yang ditindaklanjuti	50%	52%	12,5
3.	Program Pengembangan Ketahanan Nasional	Meningkatnya kualitas pelaksanaan pendidikan pimpinan tingkat nasional secara efektif dan efisien serta optimal yang dapat dipertanggung jawabkan	a. Indeks Peserta Program Pendidikan Singkat Angkatan (PPSA) Lemhannas	50%	52%	180,8
			b. Indeks Peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) Lemhannas	50%	52%	
			c. Indeks Peserta Penataran Istri/Suami (PPSA/PPRA) Lemhannas	45%	47%	
			d. Indeks pelaksanaan konsolidasi Taja, Taji, Taprof dan pejabat struktural	50%	52%	
			e. Indeks pelaksanaan Forum Konsolidasi Bupati, Walikota & Ketua DPRD Kabupaten/Kota	45%	47%	

KEMENTERIAN/LEMBAGA : LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL

NO	PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
4.	Program Pengembangan Ketahanan Nasional	Meningkatnya kualitas pelaksanaan Pengkajian yang bersifat konseptual dan strategis mengenai berbagai permasalahan nasional, regional dan internasional yang dapat dipertanggungjawabkan	a. Indeks pengkajian strategik di bidang politik	50%	52%	46,3
			b. Indeks pengkajian strategik di bidang ekonomi	50%	52%	
			c. Indeks pengkajian strategik di bidang sosial budaya	50%	52%	
			d. Indeks pengkajian strategik di bidang pertahanan keamanan	50%	52%	
			e. Indeks pengkajian strategik di bidang internasional	50%	52%	
a	Penyusunan Rencana dan Pelaksanaan Pengkajian Strategik di Bidang Pertahanan Keamanan	Meningkatnya kualitas penyusunan rencana pengkajian strategik di bidang pertahanan keamanan	Indeks pengkajian strategik di bidang pertahanan keamanan	50%	52%	8,4
5.	Program Pengembangan Ketahanan Nasional	Meningkatnya kualitas pelaksanaan perumusan kebijaksanaan secara konseptual serta mengembangkan konsep-konsep dibidang pemantapan nilai-nilai kebangsaan yang dapat dipertanggungjawabkan	a. Indeks pemantapan substansi nilai-nilai Ideologi dan Kewaspadaan Nasional	50%	52%	36,5
			b. Indeks pemantapan substansi nilai-nilai Konstitusi dan Sistem Nasional	50%	52%	
			c. Indeks pemantapan substansi nilai-nilai Semangat Bela Negara	55%	57%	
			d. Indeks pemantapan Transformasi Nilai-nilai Universal	55%	57%	
			e. Indeks Pengembangan Sumber Daya Manusia pada Deputi Bidang pemantapan Nilai-nilai Kebangsaan	55%	57%	
TOTAL ALOKASI LEMHANAS 2010-2014						868,7

**RENCANA TINDAK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH 2010-2014
PER KEMENTERIAN/LEMBAGA**

KEMENTERIAN/LEMBAGA: BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

No	PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
1.	PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA BKPM					838,6
a.	Pengembangan Sistem Pelayanan Informasi dan perijinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) (Prioritas Nasional)	Meningkatnya kualitas pengembangan Sistem Pelayanan Informasi dan perijinan Investasi Secara Elektronik/ Online (SPIPISE)	Peningkatan jumlah aplikasi perijinan dan non perijinan yang menjadi wewenang BKPM, PTSP Propinsi, PTSP Kab./Kota yang terbangun dalam SPIPISE	Perijinan di 3 sektor	Implementasi nasional unyuk semua sektor	100,3
			Jumlah peningkatan PTSP Prop. dan Kab/Kota yang terhubung dalam SPIPISE	50 Kab/Kota dan 33 Propinsi	50 Kab/Kota dan 33 Propinsi	
			Terbangunnya infrastruktur dan database penanaman modal yang terintegrasi	Penambahan kapasitas dan kemampuan infrastruktur pada jaringan BKPM	Penambahan kapasitas dan kemampuan infrastruktur pada jaringan BKPM	
			Jumlah Propinsi dan Kab/Kota yang mengikuti sosialisasi & pelatihan	50 Kab/Kota dan 33 Propinsi	50 Kab/Kota dan 33 Propinsi	
b.	Pengembangan Sumber Daya Manusia (Prioritas Bidang)	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan dan pengkoordinasian pendidikan dan pelatihan bagi aparatur	Jumlah aparatur BKPM yang mengikuti Diklat Struktural, Diklat Teknis, Diklat Fungsional, dan tenaga kediklatan serta jumlah kurikulum dan modul diklat.	2.579 Orang 10 modul	2.000 Orang 19 modul	34,1

KEMENTERIAN/LEMBAGA: BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

No	PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
2.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR					63,0
a.	Pembangunan/ pengadaan/ peningkatan sarana dan prasarana (Prioritas Bidang)	Meningkatnya sarana dan prasarana kerja yang dibutuhkan	Persentase tercapainya peningkatan sarana dan prasarana kerja di pusat dan daerah	100%	100%	63,0
3.	PROGRAM PENINGKATAN DAYA SAING PENANAMAN MODAL					1.340,3
a.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Persetujuan Penanaman Modal (prioritas bidang)	Meningkatnya kualitas pelayanan penerbitan surat persetujuan penanaman modal	1. Jumlah persetujuan yang dapat diproses dalam satu satuan waktu tertentu. 2. Jumlah partisipasi instansi sektoral dan daerah dalam pelaksanaan sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). 3. Jumlah kegiatan sinkronisasi dan harmonisasi tentang tata cara pelayanan penerbitan surat persetujuan penanaman modal bagi aparatur pemerintah propinsi dan kabupaten atau kota serta dunia usaha 4. Jumlah pedoman penilaian permohonan penanaman modal 5. Jumlah penyelenggaraan peningkatan kapasitas teknis bagi aparatur pelaksana pelayanan penanaman modal	100%	100%	25,4
b.	Peningkatan Kualitas Pelayanan perijinan Penanaman Modal (prioritas bidang)	Meningkatnya kapasitas pelayanan perijinan penanaman modal	1. Jumlah perijinan yang dapat diproses dalam satu satuan waktu tertentu. 2. Jumlah partisipasi instansi sektoral dan daerah dalam pelaksanaan sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).	100%	100%	19,3

KEMENTERIAN/LEMBAGA: BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

No	PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
			3. Jumlah kegiatan sinkronisasi dan harmonisasi tentang tata cara pelayanan perijinan penanaman modal bagi aparatur pemerintah propinsi dan kabupaten atau kota serta dunia usaha	100%	100%	
			4. Jumlah pedoman penilaian permohonan penanaman modal	1 (satu) buah buku pedoman	5 (lima) buah buku pedoman ^{k)}	
			5. Jumlah penyelenggaraan peningkatan kapasitas teknis bagi aparatur pelaksana pelayanan penanaman modal	100%	100%	
c.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Fasilitas Penanaman Modal (prioritas bidang)	Meningkatnya kualitas pelayanan fasilitas penanaman modal	1. Jumlah fasilitas penanaman modal yang dapat diproses dalam satu satuan waktu tertentu.	100%	100%	24,0
			2. Jumlah partisipasi instansi sektoral dan daerah dalam pelaksanaan sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu	100%	100%	
			3. Jumlah kegiatan sinkronisasi dan harmonisasi tentang tata cara pelayanan fasilitas penanaman modal bagi aparatur pemerintah propinsi dan kabupaten atau kota serta dunia usaha	5 Propinsi	10 Propinsi	
			4. Jumlah pedoman penilaian permohonan penanaman modal	2 pedoman	11 pedoman ^{k)}	
			5. Jumlah penyelenggaraan peningkatan kapasitas teknis bagi aparatur pelaksana pelayanan penanaman modal	6 Materi	8 Materi	
			6. Tercapainya peningkatan jumlah komoditas yang dapat dijadikan acuan dalam proses penilaian	10 Bidang	54 Bidang ^{k)}	
d.	Peningkatan Deregulasi Kebijakan Penanaman Modal (prioritas bidang)	Merealisasikan kegiatan kajian analisis kebijakan dan kegiatan sosialisasi kebijakan yang berorientasi pada peningkatan daya saing	1. Jumlah rumusan untuk bahan pertimbangan penyusunan rumusan kebijakan penanaman modal	rekomendasi	5 rekomendasi ^{k)}	92,3

KEMENTERIAN/LEMBAGA: BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

No	PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
			2. Jumlah rumusan kebijakan sebagai masukan bagi penyempurnaan kebijakan dan pengembangan penanaman modal yang berdaya saing	1 rumusan	5 rumusan ^{K)}	
			3. Jumlah kegiatan dan peserta sosialisasi kebijakan penanaman modal	55 kegiatan (15 sosialisasi di dalam negeri, 5 sosialisasi di luar negeri, 20 fasilitasi di dalam negeri, 15 fasilitasi di luar negeri)	55 kegiatan (15 sosialisasi di dalam negeri, 5 sosialisasi di luar negeri, 20 fasilitasi di dalam negeri, 15 fasilitasi di luar negeri)	
e.	Pengembangan Potensi Penanaman Modal Daerah (prioritas bidang)	Merealisasikan kegiatan identifikasi pemetaan dan pengembangan potensi yang diarahkan bagi peningkatan penanaman modal di daerah	1. Jumlah Informasi data potensi daerah yang mutakhir yang didokumentasikan secara elektronik.	33 Propinsi	33 Propinsi	37,1
			2. Jumlah kegiatan dan peserta workshop pengembangan potensi daerah dan sosialisasi Sistem Informasi Potensi Investasi Daerah (SIPID)	Workshop: 4 daerah 400 psrta	Workshop: 6 daerah 600 psrta	
				Sosialisasi: 5 daerah 250 org	Sosialisasi: 5 daerah 500 org	
			3. Jumlah hasil Kajian dan pemetaan tentang potensi daerah serta pengembangan potensi wilayah investasi dan pengembangan industri.	1hasil kajian 10 peta potensi daerah (mendalam) dan 23 peta potensi daerah secara umum	1hasil kajian 10 peta potensi daerah (mendalam) dan 23 peta potensi daerah secara umum	

KEMENTERIAN/LEMBAGA: BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

No	PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
f.	Pemberdayaan Usaha Nasional (prioritas bidang)	Merealisasikan kegiatan fasilitasi kemitraan usaha bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dalam pemberdayaan usaha nasional	1. Jumlah pelaksanaan Forum Komunikasi Pemberdayaan Usaha Nasional.	5 Lokasi	4 Lokasi	39,4
			2. Jumlah pelaksanaan <i>Matchmaking</i> Dalam dan Luar Negeri.	4 Lokasi	4 Lokasi	
			3. Jumlah pelaksanaan Pelatihan Peningkatan Kemampuan Kewirausahaan UMKMK.	5 Lokasi	6 Lokasi	
			4. Jumlah hasil Kajian Peningkatan Partisipasi UMKM.	1 Set	5 Set ^{k)}	
g.	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Wilayah I (prioritas bidang)	Mendorong realisasi penanaman modal di Sumatera	1. Jumlah proyek yang dipantau perkembangan realisasi penanaman modalnya di seluruh propinsi di Pulau Sumatera dan kepulauan di sekitarnya.	1.500 proyek	1.700 proyek	42,7
			2. Jumlah daerah yang mendapatkan bimbingan dan fasilitasi penyelesaian masalah yang dihadapi	10 Daerah	10 Daerah	
			3. Jumlah perusahaan yang mendapatkan pengawasan pelaksanaan penanam modal.	200 Perusahaan	150 Perusahaan	
h.	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Wilayah II (prioritas bidang)	Mendorong realisasi penanaman modal di Kalimantan , DKI Jakarta dan DI Yogyakarta	1. Jumlah proyek yang dipantau perkembangan realisasi penanaman modalnya di propinsi DKI Jakarta, DI Yogyakarta, dan seluruh propinsi di Pulau Kalimantan dan kepulauan di sekitarnya.	6.000 Proyek	7.000 Proyek	28,0
			2. Jumlah daerah yang mendapatkan bimbingan dan fasilitasi penyelesaian masalah yang dihadapi penanam modal antara lain dengan instansi terkait, masyarakat sekitar lokasi proyek, lingkungan hidup dan ketenagakerjaan	6 Daerah	6 Daerah	
			3. Jumlah perusahaan yang mendapatkan pengawasan pelaksanaan penanam modal	240 Perusahaan	480 Perusahaan	

KEMENTERIAN/LEMBAGA: BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

No	PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
i.	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Wilayah III (prioritas bidang)	Mendorong realisasi penanaman modal di Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah dan Sulawesi	1. Jumlah proyek yang dipantau perkembangan realisasi penanaman modalnya di Propinsi Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah dan seluruh propinsi di Pulau Sulawesi dan kepulauan di sekitarnya.	4.000 Proyek	6.000 Proyek	14,7
			2. Jumlah daerah yang mendapatkan bimbingan dan fasilitasi penyelesaian masalah yang dihadapi penanaman modal antara lain dari aspek dengan instansi terkait, masyarakat sekitar lokasi proyek, lingkungan hidup dan ketenagakerjaan	9 Daerah	9 Daerah	
			3. Jumlah perusahaan yang mendapatkan pengawasan pelaksanaan penanaman modal	400 perusahaan	600 perusahaan	
j.	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Wilayah IV (prioritas bidang)	Mendorong realisasi penanaman modal di Direktorat Wilayah IV (Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat)	1. Jumlah proyek yang dipantau perkembangan realisasi penanaman modalnya seluruh propinsi Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat	1.550 proyek	2.000 proyek	41,1
			2. Jumlah daerah yang mendapatkan bimbingan dan fasilitasi penyelesaian masalah yang dihadapi penanaman modal antara lain dari aspek dengan instansi terkait, masyarakat sekitar lokasi proyek, lingkungan hidup dan ketenagakerjaan	8 daerah	8 daerah	
			3. Jumlah perusahaan yang pengawasan pelaksanaan penanaman modal	200 perusahaan	150 perusahaan	
			4. Pemberian penghargaan investasi dan pelayanan Penanaman Modal kepada Propinsi atau Kabupaten/Kota serta perusahaan PMA/PMDN	-	4 paket ^{k)}	
k.	Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Penanaman Modal *) (prioritas nasional)	Meningkatnya kualitas pelayanan penanaman modal di pusat dan di daerah	Pendidikan dan Pelatihan Penyelenggaraan PTSP di bidang Penanaman Modal	Peserta : 2.000 orang	Peserta : 2.000 orang	265,7
				4 jenis pelatihan:	4 jenis pelatihan:	

KEMENTERIAN/LEMBAGA: BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

No	PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
				Dasar, Lanjutan I, Lanjutan II, & SPIPISE	Dasar, Lanjutan I, Lanjutan II, & SPIPISE	
			Penetapan Kualifikasi Kelembagaan PTSP di Bidang Penanaman Modal	265 PTSP	265 PTSP	
			Pengadaan sarana dan prasarana penunjang Penyelenggaraan PTSP di bidang Penanaman Modal	33 Prov + 30 kab/kota	33 Propinsi+90 kab.kota ^{K)}	
			Sosialisasi perijinan dan nonperijinan di bidang penanaman modal	33 Propinsi	33 Propinsi	
			Fasilitasi Penghubung di BKPM	19 instansi + 33 Propinsi masing-masing 1 orang	19 instansi + 33 Propinsi masing-masing 1 orang	
			Penyederhanaan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal (<i>Streamlining</i> Bisnis Proses perijinan dan Nonperijinan)	3 Instansi	3 Instansi	
1.	Kerjasama Bilateral dan Multilateral di Bidang Penanaman Modal (prioritas bidang)	Meningkatnya strategi dan teknik yang berdaya saing untuk memperoleh manfaat yang optimal dari perundingan-perundingan kerjasama bilateral dan multilateral dalam rangka memberikan jaminan dan perlindungan di bidang penanaman modal	1. Jumlah laporan partisipasi aktif BKPM dalam fora perundingan kerjasama bilateral dan multilateral. 2. Jumlah laporan tentang jumlah dan kualitas bahan posisi perundingan dalam rangka kerjasama bilateral dan multilateral. 3. Jumlah laporan koordinasi internal dan eksternal dalam kerangka kerjasama pengembangan ekonomi wilayah tertentu. 4. Jumlah peserta sosialisasi hasil-hasil perundingan bilateral dan multilateral.	23 Laporan 4 Laporan 2 Laporan 120 Orang	106 Laporan ^{K)} 20 Laporan ^{K)} 10 Laporan ^{K)} 100 Orang	22,5

KEMENTERIAN/LEMBAGA: BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

No	PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
m.	Kerjasama Regional di Bidang Penanaman Modal (prioritas bidang)	Meningkatnya strategi dan teknik yang berdaya saing untuk memperoleh manfaat yang optimal dari perundingan-perundingan kerjasama regional dalam rangka memberikan jaminan dan perlindungan di bidang penanaman modal	1. Jumlah laporan partisipasi aktif BKPM dalam fora perundingan kerjasama regional.	30 Laporan	155 Laporan ^{k)}	30,1
			2. Jumlah laporan tentang jumlah dan kualitas bahan posisi perundingan dalam rangka kerjasama regional.	33 Laporan	158 Laporan ^{k)}	
			3. Jumlah laporan kegiatan penyelenggaraan Seknas KESR.	24 Laporan	120 Laporan ^{k)}	
			4. Jumlah peserta sosialisasi hasil-hasil perundingan kerjasama regional	180 Orang	220 Orang	
n.	Kerjasama dengan Dunia Usaha Asing di Dalam dan di Luar Negeri di Bidang Penanaman Modal (prioritas bidang)	Meningkatnya strategi dan teknik yang berdaya saing untuk memperoleh manfaat yang optimal dari perundingan-perundingan kerjasama dunia usaha internasional	1. Jumlah partisipasi aktif BKPM dalam fora perundingan kerjasama dengan dunia usaha internasional.	35 kali	50 kali	16,9
			2. Jumlah kesepakatan kerjasama dengan dunia usaha internasional	4 kesepakatan	16 kesepakatan	
			3. Jumlah laporan pendataan penanam modal dalam negeri yang menjalankan kegiatan penanaman modalnya di luar wilayah Indonesia dan sosialisasinya kepada instansi terkait.	Laporan pendataan dan informasi FDI <i>Outflow</i> Indonesia melalui 5 kali sosialisasi di KBRI/KJRI	Laporan pendataan dan informasi FDI <i>Outflow</i> Indonesia melalui 10 kali sosialisasi di KBRI/KJRI	
o.	Perencanaan Pengembangan Penanaman Modal Sektor Industri Agribisnis & Sumber Daya Alam Lainnya (prioritas bidang)	Meningkatnya kualitas Pemetaan & Perencanaan Pengembangan Penanaman Modal Sektor Industri Agribisnis & Sumber Daya Alam Lainnya	1. Jumlah pedoman arah kebijakan umum perencanaan penanaman modal yang berorientasi pada peningkatan daya saing di sektor industri agribisnis dan sumber daya alam lainnya.	1 pedoman arah kebijakan penanaman modal	5 pedoman arah kebijakan penanaman modal ^{k)}	31,2

KEMENTERIAN/LEMBAGA: BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

No	PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
			2. Jumlah kajian perencanaan pengembangan penanaman modal yang berorientasi pada peningkatan daya saing di sektor industri agribisnis dan sumber daya alam lainnya.	1 kajian sektor baru dan 1 kajian sektor <i>Up-Dating</i>	5 kajian sektor baru dan 1 kajian sektor <i>Up-Dating</i> ^{K)}	
			3. Jumlah kajian perencanaan insentif penanaman modal di sektor industri agribisnis dan sumber daya alam lainnya.	1 kajian perencanaan insentif penanaman modal	5 kajian perencanaan insentif penanaman modal ^{K)}	
			4. Jumlah buku pedoman tentang Norma, Standar dan Prosedur yang Baku dalam melakukan Perencanaan Penanaman Modal di Pusat dan di Daerah di Sektor Agribisnis & Sumber Daya Alam lainnya.	1 buku pedoman NSP perencanaan penanaman modal	5 buku pedoman NSP perencanaan penanaman modal ^{K)}	
p.	Perencanaan Pengembangan Penanaman Modal Sektor Industri Manufaktur (prioritas bidang)	Meningkatnya kualitas Perencanaan Pengembangan Penanaman Modal Sektor Industri Manufaktur	1. Jumlah pedoman arah kebijakan perencanaan penanaman modal yang berorientasi pada peningkatan daya saing di sektor industri manufaktur.	1 pedoman arah kebijakan penanaman modal	1 pedoman arah kebijakan penanaman modal	31,8
			2. Jumlah kajian perencanaan pengembangan penanaman modal yang berorientasi pada peningkatan daya saing di sektor industri manufaktur.	1 kajian sektor baru dan 1 kajian sektor <i>Up-Dating</i>	5 kajian sektor baru dan 1 kajian sektor <i>Up-Dating</i> ^{K)}	
			3. Jumlah kajian Perencanaan Insentif Penanaman Modal di Sektor Industri Manufaktur	1 kajian perencanaan insentif penanaman modal	5 kajian perencanaan insentif penanaman modal ^{K)}	
			4. Jumlah buku tentang Norma, Standar dan Prosedur yang Baku dalam melakukan Perencanaan Penanaman Modal di Pusat dan di Daerah di Sektor Industri Manufaktur	1 buku pedoman NSP perencanaan penanaman modal	5 buku pedoman NSP perencanaan penanaman modal ^{K)}	
q.	Perencanaan Pengembangan Penanaman Modal di bidang Sarana, Prasarana, Jasa dan Kawasan (prioritas bidang)	Meningkatnya kualitas Pemetaan & Perencanaan Pengembangan Penanaman Modal di Bidang Sarana, Prasarana, Jasa dan Kawasan	1. Jumlah pedoman arah kebijakan perencanaan penanaman modal yang berorientasi pada peningkatan daya saing di sektor sarana prasarana, jasa dan kawasan.	1 pedoman	5 pedoman ^{K)}	27,1

KEMENTERIAN/LEMBAGA: BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

No	PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
			2. Jumlah kajian perencanaan pengembangan penanaman modal yang berorientasi pada peningkatan daya saing di sektor sarana prasarana, jasa dan kawasan.	1 kajian baru dan 1 <i>updating</i> kajian	5 kajian baru dan 1 <i>updating</i> kajian ^{k)}	
			3. Jumlah kajian Perencanaan Insentif Penanaman Modal di sektor Sarana, Prasarana, Jasa dan Kawasan.	1 kajian	5 kajian ^{k)}	
			4. Jumlah buku tentang Norma, Standar dan Prosedur Baku dalam melakukan Perencanaan Penanaman Modal di Pusat dan di Daerah di sektor Sarana, Prasarana, Jasa dan Kawasan.	1 buku pedoman NSP perencanaan penanaman modal/1 <i>Updating</i> kajian	5 buku pedoman NSP perencanaan penanaman modal/ 1 <i>Updating</i> kajian ^{k)}	
r.	Pengembangan Penanaman Modal di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) (prioritas nasional)	Terbangunnya KEK di 5 lokasi	Persentase penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan KEK	100%	100%	18,0
			Persentase penetapan institusi Sekretariat Dewan Nasional KEK	100%	100%	
			Persentase pengoperasian Sekretariat Dewan Nasional KEK	-	100%	
			asistensi dan fasilitasi dalam rangka penetapan dan pengembangan KEK (a.l. verifikasi, <i>assessment</i> , evaluasi)	100%	100%	
			Hasil koordinasi masalah strategis di bidang pengembangan KEK	1 buku laporan	5 buku laporan ^{k)}	
			Jumlah promosi penanaman modal di KEK	2 negara & 3 daerah	7 negara & 8 daerah	
			Kerja sama di bidang pengembangan KEK	-	5 negara	
s.	Peningkatan Kualitas Strategi Promosi di Bidang Penanaman Modal (prioritas nasional)	Meningkatnya kualitas pengembangan strategi promosi yang berpijak pada peningkatan daya saing penanaman modal	1. Pemetaan kebijakan, insentif dan potensi penanaman modal negara pesaing dan negara target investasi yang berorientasi pada peningkatan strategi promosi penanaman modal.	180 target investor potensial	240 target investor potensial	207,3

KEMENTERIAN/LEMBAGA: BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

No	PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
			2. Pemetaan sektor potensial di Indonesia yang berorientasi pada pengembangan kebijakan promosi penanaman modal.	informasi iklim investasi di Indonesia dan 6 negara pesaing	informasi iklim investasi di Indonesia dan 12 negara pesaing	
			3. Jumlah perencanaan dan pengembangan fokus strategi promosi penanaman modal yang berbasis sektor, wilayah dan baurannya.	16 bahan masukan dalam penyusunan strategi promosi investasi	24 bahan masukan dalam penyusunan strategi promosi investasi	
			4. Jumlah strategi promosi penanaman modal yang efektif dan efisien dengan mengedepankan daya saing penanaman modal.	16 strategi promosi	24 strategi promosi	
			5. Sarana promosi penanaman modal yang efektif dengan pengembangan kantor perwakilan BKPM di luar negeri.	Mendapatkan investor asing sebanyak-banyaknya dari 6 perwakilan di luar negeri	Mendapatkan investor asing sebanyak-banyaknya dari 10 perwakilan di luar negeri	
t.	Promosi Penanaman Modal Sektoral Terpadu dan Terintegrasi di Dalam dan Luar Negeri (prioritas nasional)	Meningkatnya kualitas promosi penanaman modal sektoral terpadu yang berpijak pada peningkatan daya saing penanaman modal	1. Penyelenggaraan promosi penanaman modal berdasarkan sektor dan negara melalui antara lain temu usaha, <i>business forum</i> , <i>business match-making</i> , dan sebagainya.	16 kegiatan	25 kegiatan	183,2
			2. Jumlah <i>Marketing</i> Investasi Indonesia dan <i>Rebranding</i> penanaman modal Indonesia melalui Media Internasional yang berpijak pada daya saing penanaman modal.	5 kegiatan	3 kegiatan	
			3. Target partisipasi <i>stakeholder</i> di tingkat pusat dalam penyelenggaraan promosi penanaman modal berdasarkan sektor dan negara di luar negeri.	3 media	3 media	

KEMENTERIAN/LEMBAGA: BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

No	PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
u.	Fasilitasi Daerah Dalam Rangka Kegiatan Promosi Penanaman Modal (prioritas nasional)	Meningkatnya kualitas fasilitasi daerah yang berpijak pada peningkatan daya saing penanaman modal	1. Jumlah fasilitasi promosi daerah	33 Instansi Penanaman Modal Propinsi untuk ikut serta dalam kegiatan promosi investasi di dalam dan luar negeri	33 Instansi Penanaman Modal Propinsi untuk ikut serta dalam kegiatan promosi investasi di dalam dan luar negeri	91,6
			2. Jumlah fasilitasi pelayanan penerimaan misi penanam modal luar negeri di pusat dan di daerah tempat tujuan rencana penanaman modal.	misi investasi 33 kali di pusat dan daerah	misi investasi 50 kali di pusat dan daerah	
			3. Jumlah pelayanan pendampingan misi pusat dan daerah ke negara potensial penanam modal di berbagai sektor usaha.	promosi investasi di 6 negara	promosi investasi di 18 negara	
			4. Jumlah kegiatan promosi penanaman modal daerah di dalam negeri antara lain <i>Talkshow</i> , Gelar Potensi Investasi Daerah (GPID), Seminar Investasi (<i>Business Meeting, Match Making, One on One Meeting</i>).	6 kali <i>TalkShow</i> di TV Nasional, 2 kali Gelar Potensi Investasi Daerah (GPID) di Jawa Timur dan Sulawesi Utara, 2 kali Seminar Investasi di Jawa Timur dan Sulawesi Utara (<i>Business Meeting, matchmaking, One-on-One Meeting</i>)	8 kali <i>TalkShow</i> di TV Nasional, 3 kali Gelar Potensi Investasi Daerah (GPID) di Sumatera Barat, Kalimantan Selatan dan DKI Jakarta, 3 kali Seminar Investasi di Sumatera Barat, Kalimantan Selatan dan DKI Jakarta (<i>Business Meeting, matchmaking, One-on-One Me</i>)	

KEMENTERIAN/LEMBAGA: BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

No	PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
			5. Jumlah kegiatan promosi penanaman modal daerah di luar negeri antara lain <i>Marketing Investasi Indonesia (MII)</i> dan <i>Trade, Tourism and Investment (TTI) Forum</i> , <i>Joint Promotion</i> antara Pusat dan Daerah, <i>Joint Promotion</i> antar Instansi Pusat (Instansi Penanaman Moda Pusat dengan Instansi-instansi Sektor dan lembaga-lembaga terkait)	Terfasilitasinya Instansi Penanaman Modal Propinsi/Instansi Penanaman Modal Kabupaten (IPMP/IPMK) dalam kegiatan MII di 3 negara dan TTI di 6 negara	Terfasilitasinya IPMP/IPMK dalam kegiatan MII di 3 negara dan TTI di 6 negara	
v.	Penyelenggaraan Pameran dan Penyediaan Sarana Promosi Penanaman Modal untuk Kegiatan di Dalam dan di Luar Negeri (prioritas bidang)	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pameran dan penyediaan sarana promosi penanaman modal yang berpijak pada peningkatan daya saing penanaman modal	1. Jumlah kegiatan pameran yang mengikutsertakan instansi penanaman modal di pusat dan daerah, instansi sektoral pusat dan daerah, asosiasi/ kalangan dunia usaha serta masyarakat lainnya dalam pelaksanaan pameran. 2. Informasi potensi penanaman modal, antara lain profil proyek, brosur, <i>leaflet</i> , <i>Indonesia Investment News</i> , <i>Guide for Investor</i> , <i>Investment Procedures</i> , film, video, slide, CD ROM dan multimedia/situs web.	150 pameran 1.000 eksemplar brosur dan leaflet, 6.500 eksemplar <i>Brief Guide for Investment</i> , 15.000 eksemplar <i>Investment Procedures</i> dan buku-buku peraturan, media elektronik.	150 pameran 2.500 eksemplar brosur dan leaflet, 9.000 eksemplar <i>Brief Guide for Investment</i> , 30.000 eksemplar <i>Investment Procedures</i> dan buku-buku peraturan, media elektronik.	51,1

KEMENTERIAN/LEMBAGA: BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

No	PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
			3. Jumlah kegiatan pameran baik di dalam maupun di luar negeri.	9 pameran di dalam negeri dan 15 pameran di luar negeri	13 pameran di dalam negeri dan 22 pameran di luar negeri	
			4. Jumlah kunjungan dan minat penanaman modal sebagai respon terhadap penyelenggaraan pameran serta kegiatan promosi lainnya baik di dalam dan di luar negeri	1.650 pengunjung dan 100 peminat	1.650 pengunjung dan 100 peminat	
w.	Peningkatan Pelayanan Hukum Penanaman Modal (Prioritas Bidang)	Meningkatnya kualitas pelayanan, pertimbangan dan bantuan hukum serta penyelesaian kasus/ sengketa di bidang penanaman modal	Jumlah pelaksanaan bantuan hukum dan penyelesaian sengketa di bidang penanaman modal secara efisien efektif.	Pelayanan konsultasi hukum penanaman modal sejumlah 48 kali konsultasi	Pelayanan konsultasi hukum penanaman modal sejumlah 34kali konsultasi	33,7
				Penanganan permasalahan dan bantuan hukum bidang penanaman modal di dalam/di luar pengadilan sejumlah 18 kegiatan	Penanganan permasalahan dan bantuan hukum bidang penanaman modal di dalam/di luar pengadilan sejumlah 14 kegiatan	
TOTAL ALOKASI BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL 2010-2014						2.241,9

K : Angka kumulatif 5 tahun (2010-2014)

**RENCANA TINDAK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH 2010-2014
PER KEMENTERIAN/LEMBAGA**

KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN NARKOTIKA NASIONAL

NO	PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
1.	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Teknis Lainnya BNN	Meningkatnya kinerja akuntabilitas dan keuangan BNN.	Opini laporan akuntabilitas kinerja dan keuangan BNN.	50 besar	10 besar	1.239,4
2.	Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)	Meningkatnya sikap positif masyarakat terhadap bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba	Prosentase peningkatan sikap positif masyarakat terhadap bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba	10%	10%	2.865,2
a.	Pelaksanaan Kegiatan Diseminasi Informasi di Bidang P4GN	Meningkatnya kegiatan Diseminasi Informasi P4GN	Tingkat pemahaman masyarakat tentang bahaya penyalahgunaan narkoba.	10%	10%	92,7
b.	Pelaksanaan Alternative Development	Meningkatnya kegiatan Alternatif Development	Jumlah penanam ganja yang beralih ke kegiatan legal produktif (orang)	50	250 ^{KJ}	27,6
c.	Pelaksanaan Kegiatan Penindakan dan Pengejaran	Meningkatnya Kegiatan Penindakan dan Pengejaran jaringan peredaran gelap narkoba	Jumlah penangkapan tersangka tindak kejahatan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba	10%	10%	147,0
d.	Pelaksanaan Kegiatan Interdiksi	Meningkatnya kegiatan interdiksi di pintu masuk (Bandara dan Pelabuhan) dan <i>Border line</i>	Jumlah Narkoba ilegal yang disita di Bandara, Pelabuhan, dan <i>Border line</i>	10%	10%	37,1
e.	Pelaksanaan Pengembangan Rehabilitasi Instansi Pemerintah	Meningkatnya fasilitas rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba yang dikelola Instansi Pemerintah	Jumlah fasilitas rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba yang dikelola Instansi Pemerintah	-	3 Fasilitas TR ^{KJ}	279,0
f.	Pelaksanaan Pengembangan Rehabilitasi Berbasis Komponen Masyarakat	Meningkatnya fasilitas rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba yang dikelola Komponen Masyarakat	Jumlah fasilitas rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba yang dikelola Komponen Masyarakat	20 Fasilitas	100 Fasilitas ^{KJ}	69,8

KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN NARKOTIKA NASIONAL

NO	PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
g.	Peningkatan Kapasitas Pelayanan BNN di Daerah	Terselenggaranya pelayanan P4GN yang dilaksanakan oleh struktur organisasi BNN Propinsi dan Kabupaten/Kota yang vertikal	1. Jumlah BNNP yang terbentuk untuk menyelenggarakan P4GN 2. Jumlah BNNK yang terbentuk untuk menyelenggarakan P4GN	-	14 BNNP dan ^{K)} 156 BNNK	1.816,5
ALOKASI BNN 2010-2014						4.104,6

K : Angka kumulatif 5 tahun (2010-2014)

**RENCANA TINDAK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH 2010-2014
PER KEMENTERIAN/LEMBAGA**

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENEG PDT

NO	PROGRAM / KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
I	Program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal					4.624,7
	Pengembangan kebijakan, koordinasi dan fasilitasi pusat produksi daerah tertinggal	1. Meningkatnya pengembangan pusat produksi di daerah tertinggal 2. Terfasilitasinya pemulihan ekonomi dan pengurangan kemiskinan, dengan menciptakan dan memberdayakan lingkungan pendukung bagi perbaikan kegiatan usaha dan pembangunan manusia	1. Persentase kabupaten di daerah tertinggal yang memiliki pusat produksi 2. (a). meningkatkan kemampuan dan keberdayaan petani skala kecil dan aparat pemerintah untuk mendukung kegiatan usaha berbasis kelompok di perdesaan, (b). Melaksanakan kegiatan perbaikan usaha pertanian dan usaha lainnya, (c). Meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam perencanaan belanja publik, manajemen pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasi program.	20% 100%	100%	309,6
	Pengembangan kebijakan, koordinasi dan fasilitasi Pusat Pertumbuhan Daerah Tertinggal	1. Meningkatnya pengembangan pusat pertumbuhan di Daerah Tertinggal 2. Terfasilitasinya pembiayaan untuk pengembangan ekonomi	1. Persentase kabupaten di daerah tertinggal yang memiliki Pusat Pertumbuhan 2. Persentase kabupaten di daerah tertinggal yang mendapatkan fasilitasi pembiayaan untuk pengembangan ekonomi melalui (a) Berkembangnya sektor usaha swasta berorientasi pasar, (b) meningkatnya kualitas dan nilai tambah produksi pertanian, perikanan, dan perkebunan, (c). Meningkatkan perdagangan internasional, dan (d). Meningkatkan investasi dalam negeri maupun luar negeri	20% 100%	100%	676,6

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENEG PDT

NO	PROGRAM / KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
	Pengembangan kebijakan, koordinasi dan fasilitasi usaha mikro kecil menengah dan koperasi daerah tertinggal	Meningkatnya pengembangan usaha mikro kecil menengah dan koperasi di daerah tertinggal	Persentase daerah tertinggal yang mengembangkan usaha mikro kecil menengah dan koperasi di daerah tertinggal	20%	100%	93,0
	Pengembangan kebijakan, koordinasi dan fasilitasi pendanaan dan kemitraan usaha daerah tertinggal	Meningkatnya ketersediaan sumber pendanaan dan pengembangan kemitraan usaha di daerah tertinggal	Persentase kabupaten didaerah tertinggal yang telah memiliki sumber pendanaan dan melaksanakan kemitraan usaha dengan daerah lain.	20%	100%	92,0
	Pengembangan kebijakan, koordinasi dan fasilitasi investasi ekonomi daerah daerah tertinggal	Meningkatnya jumlah dan nilai investasi di daerah tertinggal	Persentase kabupaten di daerah tertinggal yang telah meningkatkan jumlah dan nilai investasi	20%	100%	96,0
	Pengembangan kebijakan, koordinasi dan fasilitasi penguatan kelembagaan pemerintah daerah tertinggal , terdepan, terluar, dan pasca konflik.	1. Meningkatnya kemampuan sistem, organisasi, dan SDM pemerintahan daerah untuk mewujudkan good governance 2. (i) Meningkatnya kemampuan kelembagaan Pemda dan masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya lokal, (ii) Meningkatnya kegiatan ekonomi, pengembangan sumberdaya manusia, dan infrastruktur lingkungan perdesaan secara terpadu di daerah tertinggal, dan (iii) Meningkatkan mobilitas penduduk dan arus barang antara daerah tertinggal ke pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan pelayanan publik, melalui PNPM Mandiri	1. Persentase kabupaten didaerah tertinggal yang memperoleh fasilitasi penguatan kelembagaan pemerintah daerah dan mengalami peningkatan indeks good governance 2. (i) Persentase jumlah kabupaten tertinggal yang kemampuan kelembagaan pembangunan masyarakat dan pemda meningkat dalam pengelolaan sumberdaya lokal, (ii) Persentase jumlah kawasan pembangunan perdesaan yang terpadu dari aspek ekonomi, sumberdaya manusia, dan infratraktur lingkungan, dan (iii) Persentase kabupaten didaerah tertinggal yang mengalami peningkatan mobilitas penduduk dan arus barang antara daerah tertinggal ke pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan pelayanan publik	20%	100%	1.227,5
	Pengembangan kebijakan, koordinasi dan fasilitasi penguatan kelembagaan sosial masyarakat daerah tertinggal	Meningkatnya kapasitas kelembagaan sosial masyarakat daerah tertinggal	Persentase kabupaten didaerah tertinggal yang memperoleh fasilitasi penguatan kelembagaan sosial masyarakat daerah tertinggal	20%	100%	89,0

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENEG PDT

NO	PROGRAM / KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
	Pengembangan kebijakan, koordinasi dan fasilitasi lembaga kerjasama antar daerah daerah tertinggal	Meningkatnya kerjasama antar lembaga pemerintah di daerah tertinggal	persentase kabupaten daerah tertinggal yang menjalin kerjasama dengan pemerintah daerah lain.	20%	100%	85,0
	Pengembangan kebijakan, koordinasi dan fasilitasi lembaga perekonomian d daerah tertinggal	Meningkatnya kapasitas lembaga perekonomian daerah tertinggal	persentase kabupaten didaerah tertinggal yang memperoleh fasilitasi penguatan lembaga perekonomian di daerah tertinggal	20%	100%	77,0
	Pengembangan kebijakan, koordinasi dan fasilitasi kemitraan antar lembaga daerah tertinggal	Meningkatnya kemitraan antar lembaga pemerintahan kabupaten daerah tertinggal	persentase kabupaten didaerah tertinggal yang memperoleh fasilitasi penguatan kemitraan antar lembaga daerah tertinggal	20%	100%	77,0
	Pengembangan kebijakan, koordinasi dan fasilitasi pembangunan infrastruktur kesehatan daerah tertinggal	Meningkatnya koordinasi pembangunan infrastruktur kesehatan daerah tertinggal	Persentase kabupaten didaerah tertinggal yang memperoleh fasilitasi pembangunan infrastruktur kesehatan daerah tertinggal	20%	100%	70,0
	Pengembangan kebijakan, koordinasi dan fasilitasi Kesehatan Dasar, Lanjutan Daerah Tertinggal	Meningkatnya persentase kabupaten didaerah tertinggal yang memiliki kebijakan di bidang Kesehatan Dasar Daerah Tertinggal	Persentase kabupaten didaerah tertinggal yang memiliki kebijakan di bidang Kesehatan Dasar Daerah Tertinggal	20%	100%	62,0
	Pengembangan kebijakan, koordinasi dan fasilitasi pembangunan infrastruktur pendidikan daerah tertinggal	Meningkatnya persentase kabupaten didaerah tertinggal yang memiliki kebijakan di bidang pembangunan infrastruktur pendidikan daerah tertinggal	Persentase kabupaten didaerah tertinggal yang memiliki kebijakan di bidang pembangunan infrastruktur pendidikan daerah tertinggal	20%	100%	48,0
	Pengembangan kebijakan, koordinasi dan fasilitasi Pendidikan Dasar, Menengah Dan Kejuruan di Daerah Tertinggal	Meningkatnya persentase kabupaten didaerah tertinggal yang memiliki kebijakan Pendidikan Dasar, Menengah Dan Kejuruan Daerah Tertinggal	Persentase kabupaten didaerah tertinggal yang memiliki kebijakan Pendidikan Dasar, Menengah Dan Kejuruan Daerah Tertinggal	20%	100%	48,0
	Pengembangan kebijakan, koordinasi dan fasilitasi Pendidikan Luar Sekolah Daerah Tertinggal	Meningkatnya persentase kabupaten didaerah tertinggal yang memiliki kebijakan di bidang Pendidikan Luar Sekolah Daerah Tertinggal	Persentase kabupaten didaerah tertinggal yang memiliki kebijakan di bidang Pendidikan Luar Sekolah Daerah Tertinggal	20%	100%	87,0
	Pengembangan kebijakan, koordinasi dan fasilitasi pembangunan infrastruktur ekonomi daerah tertinggal	Meningkatnya persentase kabupaten didaerah tertinggal yang memiliki kebijakan pembangunan infrastruktur ekonomi daerah tertinggal	Persentase kabupaten didaerah tertinggal yang memiliki kebijakan pembangunan infrastruktur ekonomi daerah tertinggal	20%	100%	170,0

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENEG PDT

NO	PROGRAM / KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
	Pengembangan kebijakan, koordinasi dan fasilitasi pembangunan infrastruktur energi daerah tertinggal	1. Meningkatnya persentase kabupaten didaerah tertinggal yang memiliki kebijakan pembangunan infrastruktur energi daerah tertinggal 2. Meningkatnya Pemanfaatan Energi Matahari untuk Pengembangan Infrastruktur Dasar di Wilayah Perdesaan Tertinggal Terpencil	1. Persentase kabupaten didaerah tertinggal yang memiliki kebijakan pembangunan infrastruktur energi daerah tertinggal 2. Persentase kabupaten didaerah tertinggal yang memiliki database permintaan kelistrikan dengan menggunakan teknologi GIS dan memanfaatkan energi matahari untuk pengembangan infrastruktur serta peningkatan kemampuan masyarakat yang dapat melakukan pemetaan Wilayah Rentan Perubahan Iklim dan Kegiatan Adaptasi Untuk Mengantisipasi Perubahan Iklim	20%	100%	220,5
	Pengembangan kebijakan, koordinasi dan fasilitasi pembangunan infrastruktur telekomunikasi daerah tertinggal	Meningkatnya persentase kabupaten didaerah tertinggal yang memiliki kebijakan pembangunan infrastruktur telekomunikasi daerah tertinggal	Persentase kabupaten didaerah tertinggal yang memiliki kebijakan pembangunan infrastruktur telekomunikasi daerah tertinggal	20%	100%	60,0
	Pengembangan kebijakan, koordinasi dan fasilitasi Pembangunan Infrastruktur Transportasi Daerah Tertinggal	Meningkatnya persentase kabupaten didaerah tertinggal yang memiliki kebijakan di bidang pembangunan infrastruktur transportasi daerah tertinggal	Persentase kabupaten didaerah tertinggal yang memiliki kebijakan di bidang pembangunan infrastruktur transportasi daerah tertinggal	20%	100%	232,0

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENEG PDT

NO	PROGRAM / KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
	Pengembangan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi daerah tertinggal di kawasan perbatasan	Meningkatnya koordinasi antar sektor dalam pengembangan daerah tertinggal di kawasan perbatasan	Jumlah rapat koordinasi	4	4	147,0
			Jumlah rencana aksi pengembangan daerah tertinggal di kawasan perbatasan yang dioperasionisasikan	27	27	
II	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis KPDT					660,7
TOTAL ALOKASI KPDT 2010-2014						5.285,4

K : Angka kumulatif 5 tahun (2010-2014)

**RENCANA TINDAK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH 2010-2014
PER KEMENTERIAN/LEMBAGA**

KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN)

NO	PROGRAM / KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
1	PROGRAM KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA	Tercapainya penduduk tumbuh seimbang	Contraceptive Prevalence Rate/CPR (%)	57,4	65	8.476,1
			1. Jumlah peserta KB baru /PB (juta)	7,1	36,7 K)	
			2. Jumlah peserta KB aktif/PA (juta)	26,7	29,8	
			3. Jumlah peserta KB baru mandiri (ribu)	3,4	17,3 K)	
			4. Persentase peserta KB aktif mandiri	48,4	51	
			5. Persentase peserta KB baru MKJP	12,1	64,3 K)	
			6. Persentase peserta KB aktif MKJP	24,2	27,5	
			7. Persentase peserta KB baru Pria	3,6	5	
1.1	Analisis dan kajian kebijakan pengendalian penduduk	Meningkatnya keserasian kebijakan pembangunan dengan kebijakan pengendalian kuantitas penduduk	1. Jumlah kajian/analisis kebijakan pembangunan yang kurang serasi dengan program KKB	34	34	101,9
			2. Persentase kebijakan pembangunan yg diserasikan dengan Kebijakan Kependudukan dan KB	-	75	
1.2	Penetapan parameter kependudukan	Tersedianya parameter kependudukan dan KB yang disepakati oleh lintas sektor terkait dan dijadikan sebagai acuan dalam penyusunan rencana dan pelaksanaan program pembangunan sektor	1. Jumlah kajian neraca kependudukan yang disusun	34	34 K)	101,6
			2. Jumlah neraca kependudukan yang disusun	34	170 K)	
			3. Jumlah kajian parameter kependudukan dan KB	34	170 K)	
			4. Persentase parameter kependudukan yang tersedia tepat waktu	-	100	
			5. Indeks pemanfaatan hasil analisis parameter kebijakan penyerasian dampak kependudukan oleh <i>stakeholders</i> dan mitra kerja (dari skala 1-4)	-	3	

KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN)

NO	PROGRAM / KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
1.3	Sosialisasi kebijakan dan program kependudukan	Meningkatnya komitmen lintas sektor serta pengetahuan, sikap, dan perilaku masyarakat tentang pembangunan berwawasan kependudukan	1. Persentase <i>Stakeholders</i> dan mitra kerja yang menerima sosialisasi	-	80	86,3
			2. Persentase penentu kebijakan yang menerapkan perspektif pembangunan berwawasan kependudukan dalam kebijakan sektor	-	50	
			3. Jumlah modul pendidikan tentang kependudukan	1	5 K)	
			4. Persentase sekolah yang melaksanakan modul pendidikan tentang kependudukan	-	20	
1.4	Pengembangan kebijakan kelompok penduduk rentan dan produktivitas penduduk	1. Tersedianya kebijakan kependudukan untuk kelompok penduduk rentan 2. Tersedianya kebijakan kependudukan terkait mobilitas penduduk dalam rangka peningkatan produktivitas wilayah	1. Jumlah kajian tentang kondisi penduduk rentan	34	102 K)	99,7
			2. Jumlah strategi penanganan Lansia dan Penduduk Rentan	34	34 K)	
			3. Persentase stakeholders dan mitra kerja yang mendapat sosialisasi strategi penanganan lansia dan penduduk rentan	20	80	
			4. Jumlah kajian potensi wilayah pengirim dan penerima tenaga kerja	34	102 2)	
			5. Jumlah analisis kebijakan pengarah mobilitas	34	102 2)	

KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN)

NO	PROGRAM / KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
1.5	Pengembangan kebijakan dan pembinaan kesertaan ber-KB ¹⁾	Meningkatnya pembinaan, kesertaan, dan kemandirian ber-KB melalui 23.500 klinik KB pemerintah dan swasta	1. Persentase NSPK tentang pembinaan kemandirian ber-KB	10	100	4.378,2
			2. Jumlah klinik KB pemerintah dan swasta yang melayani KB	23.500	23.500	
			3. Jumlah peserta KB baru miskin (KPS dan KS-1) dan rentan lainnya yang mendapatkan pembinaan dan alokon gratis melalui 23.500 klinik KB pemerintah dan swasta (juta)	3,75	19,46 K)	
			4. Jumlah peserta KB aktif miskin (KPS dan KS-1) dan rentan lainnya yang mendapatkan pembinaan dan alokon gratis melalui 23.500 klinik KB pemerintah dan swasta (juta)	11,9	62,5 K)	
			5. Persentase komplikasi berat yang dilayani	0,12	0,11	
			6. Persentase kegagalan KB yang dilayani	0,03	0,03	
			7. Jumlah pencabutan implant yang dilayani (kasus)	297.600	1.831.941 K)	
			8. Persentase kab/kota yang menyediakan sarana dan prasarana pelayanan KB	40	90	
			9. Jumlah klinik KB pemerintah dan swasta yang mendapat dukungan sarana prasarana	4.700	23.500 K)	
1.6	Penguatan sumberdaya penyelenggara program KB	Meningkatnya kapasitas sumberdaya penyelenggara program KB di 23.500 klinik KB pemerintah dan swasta dalam rangka pembinaan, kesertaan, dan kemandirian ber-KB	1. Persentase tenaga pelayanan KB terlatih di 23.500 klinik KB pemerintah dan swasta	35	100	646,9
			2. Persentase klinik KB yang melayani KB sesuai SOP (dari 23.500 klinik KB pemerintah dan swasta)	20	85	

KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN)

NO	PROGRAM / KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
1.7	Penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja (PKBR)	Meningkatnya PSP remaja tentang PKBR	1. Jumlah kebijakan tentang PKBR	1	5 K)	205,3
			2. Persentase pengetahuan remaja tentang :			
			a. Kesehatan reproduksi remaja	50	62	
			b. HIV/AIDS	64	76	
			c. Perencanaan kehidupan berkeluarga	10	30	
			3. Jumlah pelatih PKBR dilatih	-	205 *)	
			4. Persentase kab/kota yang mempunyai kebijakan program PKBR	20	100	
			5. Persentase mitra kerja yang melaksanakan kegiatan PKBR	20	100	
			6. Jumlah center of excellent PKBR (per provinsi)	1	15 K)	
7. Jumlah PIK remaja/ mahasiswa yang dibentuk dan dibina	9.373	63.977 K)				
1.8	Peningkatan kemandirian ber-KB keluarga Pra-S dan KS-1	Meningkatnya pembinaan dan kemandirian ber-KB keluarga Pra-S dan KS-1	1. Jumlah kebijakan kegiatan pemberdayaan ekonomi keluarga peserta KB	3	6 K)	135,7
			2. Jumlah PUS anggota kelompok usaha ekonomi produktif yang menjadi peserta KB mandiri	22.000	110.000	
			3. Persentase Kab/kota yang mempunyai kebijakan pemberdayaan ekonomi keluarga peserta KB	20	75	
			4. Jumlah mitra kerja yang memberikan bantuan modal dan pembinaan kewirausahaan kepada kelompok usaha ekonomi produktif	34	170 K)	
			5. Jumlah tenaga pengelola kegiatan pemberdayaan ekonomi keluarga peserta KB yang dilatih	-	99 K)	
			6. Jumlah mitra kerja yang menjadi pendamping kelompok usaha ekonomi produktif	3	15 K)	

KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN)

NO	PROGRAM / KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
1.9	Pembinaan ketahanan keluarga	1. Meningkatnya ketahanan keluarga dalam rangka peningkatan kesertaan, pembinaan, dan kemandirian ber-KB bagi PUS anggota poktan 2. Meningkatnya ketrampilan keluarga dalam pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak, pembinaan remaja, serta peningkatan kualitas hidup lansia	1. Jumlah kebijakan kegiatan pembinaan ketahanan keluarga	4	8 K)	222,6
			2. Jumlah mitra kerja yang melaksanakan pembinaan dan pendampingan ketahanan keluarga	2	20 K)	
			3. Persentase kab/kota yang mempunyai kebijakan pembinaan ketahanan keluarga	50	75	
			4. Jumlah tenaga pengelola pembinaan ketahanan keluarga yang dilatih	-	1.341 K)	
			5. Jumlah tenaga pelatih pembinaan ketahanan keluarga yang dilatih	-	1.644 K)	
			6. Jumlah prototype BKB-Kit yang diproduksi	1	5 K)	
			7. Persentase kabupaten/kota yang memperoleh dan mendayagunakan prototype BKB-Kit	20	20	
1.10	Peningkatan advokasi kepada stakeholder	Meningkatnya komitmen stakeholders terhadap pengendalian penduduk dan program KB	1. Jumlah kebijakan tentang advokasi kepada <i>stakeholders</i> yang dikeluarkan	-	2 K)	281,8
			2. Persentase stakeholder dan mitra kerja mempunyai kebijakan Kependudukan dan KB	20	80	
1.11	Peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi pengendalian penduduk dan KB	Meningkatnya pengetahuan, sikap dan perilaku masyarakat tentang pengendalian penduduk dan KB	1. Jumlah kebijakan tentang komunikasi, informasi, dan edukasi	-	2 K)	958,8
			2. Persentase media dan materi KIE yang diproduksi	-	100	
			3. Persentase PUS, WUS, dan remaja yg mengetahui informasi KKB melalui media massa (cetak dan elektronik) dan media luar ruang	95	95	

KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN)

NO	PROGRAM / KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
			4. Persentase media cetak dan elektronik yang menayangkan informasi KKB	-	100	
			5. Jumlah media luar ruang yang menayangkan informasi KKB	-	328 K)	
			6. Persentase klinik KB dan mitra kerja yang mendapatkan media dan materi KIE	-	287 K)	
			7. Jumlah PLKB yang mendapatkan KIE-Kit	-	1.000 K)	
			8. Jumlah petugas Mupen yang dilatih	-	1.584 K)	
			9. Persentase kab/kota yang mendapatkan sarana prasarana KIE	-	100	
1.12	Pengembangan media komunikasi	Tersedia dan dimanfaatkannya media dan materi KIE pengendalian penduduk dan KB	1. Jumlah kebijakan tentang publikasi kependudukan dan KB	-	2 K)	281,8
			2. Jumlah prototype yang diproduksi	-	3 K)	
			3. Persentase stakeholders mendayagunakan prototype bahan dan media advokasi dan KIE Kependudukan dan KB	-	70	
			4. Persentase mitra kerja mendayagunakan prototype bahan dan media advokasi dan KIE Kependudukan dan KB	-	100	
			5. Jumlah publikasi yang disusun	12	60 K)	
			6. Indeks kepuasan pelanggan terhadap publikasi (dari skala 1-4)	3	3	
1.13	Peningkatan kemitraan dengan lintas sektor dan pemerintah daerah	Meningkatnya komitmen dan peran serta lintas sektor dan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan program KKB	1. Jumlah kebijakan kemitraan lintas sektor dan pemerintah daerah	1	7 K)	266,3
			2. Jumlah kab/kota yang membentuk BKKBD	-	435 K)	
			3. Persentase kab/kota mempunyai kebijakan program KKB dalam rencana pembangunan daerah	100	100	
			4. Persentase kab/kota melaksanakan NSPK	-	75	

KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN)

NO	PROGRAM / KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
1.14	Peningkatan kemitraan dengan sektor swasta, LSM, dan masyarakat	Meningkatnya peran serta LSM, swasta, dan masyarakat dalam penyelenggaraan program KKB	1. Jumlah MOU baru	2	10 K)	269,8
			2. Persentase MOU yang operasional	25	65	
			3. Persentase pelatih IMP yang terlatih	20	80	
			4. Persentase toga/toma/toda yang terlatih	-	75	
			5. Persentase motivator swasta dan LSM yang terlatih	-	75	
			6. Jumlah tenaga lini lapangan KB (PLKB/PKB) yang terlatih:			
			1. Latihan dasar umum (LDU)	1.065	3.750 K)	
			2. Refreshing	1.350	11.000 K)	
			3. Pelatihan teknis	3.018	12.875 K)	
1.15	Penyediaan data dan informasi Program Kependudukan dan KB	Tersedianya data dan informasi Program Kependudukan dan KB berbasis TI	1. Jumlah kebijakan yang berkaitan dengan penyediaan data dan informasi	1	4 K)	165,6
			2. Persentase cakupan laporan:			
			1. Provinsi	100	100	
			2. Kab/Kota	85	85	
			3. Jumlah data dan informasi yang tersedia tepat waktu	918	4.590 K)	
1.16	Peningkatan kualitas analisis data dan informasi manajemen program kependudukan dan KB	Tersedia dan meningkatnya kualitas analisis data dan informasi manajemen program kependudukan dan KB	1. Jumlah kebijakan analisis dan evaluasi pengelolaan kependudukan dan KB	2	5 K)	84,7
			2. Persentase hasil analisis dan evaluasi yang dimanfaatkan dalam pengelolaan kependudukan dan KB	50	100	
			3. Jumlah pelaporan pelaksanaan program	72	360 K)	

KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN)

NO	PROGRAM / KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
1.17	Peningkatan pelayanan informasi dan dokumentasi Program KKB berbasis TI	Meningkatnya pelayanan informasi dan dokumentasi Program KKB bagi stakeholders	1. Jumlah kebijakan pelayanan informasi dan dokumentasi Program KKB berbasis TI	2	5 K)	82,3
			2. Jumlah publikasi berbahasa Indonesia	6	42 K)	
			3. Jumlah publikasi luar negeri	2	14 K)	
			4. Indeks kepuasan stakeholders terhadap hasil publikasi (dari skala 1-4)	3	3	
			5. Frekuensi pemutakhiran data dan informasi di website	12	12	
			6. Persentase PKB yang mendapatkan pelatihan e-learning	7	30	
			7. Persentase PKB yang mendapatkan pelatihan e-learning dan mengakses e-learning	20	80	
1.18	Pengembangan teknologi informasi komunikasi	Tersedia dan meningkatnya sarana prasarana dan teknologi informasi komunikasi program kependudukan dan KB	1. Jumlah kebijakan STIK Kependudukan dan KB	2	4 K)	107,0
			2. Jumlah aplikasi STIK Kependudukan dan KB	4	20 K)	
			3. Jumlah pengembangan/ penyediaan infrastruktur TIK	1	5 K)	
			4. Persentase cakupan jejaring STIK Kependudukan dan KB sampai kab/kota	15	80	
			5. Indeks kepuasan pelanggan (dari skala 1-4)	3	3	
2	PROGRAM PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN BKKBN	Meningkatnya kualitas pelaksanaan pelatihan SDM aparatur, serta penelitian Program Kependudukan dan KB	1. Jumlah SDM aparatur yang terlatih (orang)	560	12.417 K)	456,3
			2. Jumlah OST dari negara lain (orang)	40	200 K)	
			3. Jumlah hasil penelitian dan pengembangan kependudukan	-	12 K)	
			4. Jumlah hasil penelitian dan pengembangan KB	3	15 K)	

KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN)

NO	PROGRAM / KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
3	PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN TUGAS TEKNIS LAINNYA BKKBN	Tersedianya dukungan manajemen dalam rangka penyelenggaraan program kependudukan dan KB	1. Persentase ketersediaan peta strategi map dan score card program kependudukan dan KB yang <i>uptodate</i>	100	100	1.840,4
			2. Persentase pegawai yang memiliki profil kompetensi	30	80	
			3. Persentase pegawai yang memiliki score card individu yang <i>uptodate</i>	75	100	
			4. Indeks kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi dan kerumah tanggaan (dari skala 1-4)	3	3	
			5. Indeks kecepatan dan ketepatan pelayanan administrasi perkantoran (dari skala 1-4)	3	3	
			6. Status laporan keuangan	-	WTP	
			7. Jumlah peraturan perundangan tentang SOTK (struktur organisasi dan tata kerja)	1	5 K)	
			8. Persentase kasus bantuan hukum yang dapat diselesaikan	90	90	
			9. Jumlah perangkat tata laksana	10	55 K)	
4	PROGRAM SARANA PRASARANA APARATUR BKKBN	Tersedianya dukungan sarana prasarana aparatur pengelola program kependudukan dan KB	1. Ratio ketersediaan alokon dan sarana Klinik KB	Lead time 3-3-1	Lead time 3-3-1	378,5
			2. Persentase kesesuaian standar gudang alokon propinsi	20	100	
5	PROGRAM PENGAWASAN DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS APARATUR BKKBN	Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan program, SDM aparatur dan administrasi umum, serta ke-uangan dan per-bekalan Prog KB	1. Persentase rekomendasi pengawasan digunakan bagi pengambilan keputusan pimpinan	100	100	26,07
			2. Persentase unit kerja yang menerapkan SAKIP	100	100	
			3. Persentase kepatuhan pejabat dalam melaporkan LHKPN	100	100	
TOTAL ALOKASI BKKBN 2010-2014						11.177,3

K : Angka kumulatif 5 tahun (2010-2014)

TABEL 2.3
RENCANA TINDAK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH 2010-2014
PER KEMENTERIAN/LEMBAGA

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KOMNAS HAM

NO	PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
I	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Komnas HAM	Meningkatnya dukungan manajemen pelaksanaan tugas teknis Komnas HAM	Jumlah rekomendasi yang terkait dengan pembentukan, perubahan & pencabutan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan HAM	8	30 ^{K)}	323,8
			Tingkat pelibatan dan penyikapan aparat negara dalam upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan serta perlindungan, penegakan dan pemajuan HAM perempuan	30%	30%	
			Prosentase penanganan pengaduan kasus pelanggaran HAM yang disampaikan kepada Komnas HAM	80%	90%	
			Prosentase kasus pelanggaran HAM yang diselesaikan melalui mekanisme mediasi	40%	85%	
			Jumlah kesepakatan/MoU kerjasama dengan <i>stakeholder</i> dalam jangka waktu yang ditargetkan	12	60 ^{K)}	
1.1	Penguatan Kesadaran HAM Masyarakat dan Aparatur Negara.	Meningkatnya kesadaran HAM masyarakat dan aparaturnegara melalui penguatan peraturan perundang-undangan yang berperspektif HAM	Jumlah rekomendasi yang terkait dengan pembentukan, perubahan dan pencabutan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan HAM	8	30 ^{K)}	41,7
			Tingkat rekomendasi hasil pengkajian dan penelitian yang terkait dengan pembentukan, perubahan dan pencabutan peraturan perundang-undangan nasional serta ratifikasi instrumen HAM internasional	50%	80%	

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KOMNAS HAM

NO	PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
			Tingkat tindak lanjut dari rekomendasi hasil pengkajian dan penelitian yang terkait dengan pembentukan, perubahan & pencabutan peraturan perundang-undangan nasional serta ratifikasi instrumen HAM internasional	50%	75%	
			Tersedianya alat ukur pemenuhan HAM (hak dasar)	4	10	
			Meningkatnya kesadaran masyarakat dan aparatur negara terhadap kegiatan pemajuan HAM melalui <i>klien feedback survey (jumlah survey)</i>	2	15 ^{KJ}	
			Prosentase kenaikan alumni pelatihan yang menjadi fasilitator HAM	5%	25%	
			Prosentase kenaikan pemahaman aparatur negara terhadap ketaatan atas produk perundang-undangan yang berperspektif HAM.	10%	10%	
1.2	Peningkatan Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM	Terlaksananya penanganan dan penyelesaian kasus pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dan instansi terkait	Prosentase penanganan pengaduan kasus pelanggaran HAM yang disampaikan kepada Komnas HAM	80%	90%	58,3
			Tersedianya sistem pengaduan <i>online</i> dan <i>database</i> pengaduan (aplikasi)	1	1	
			Prosentase rekomendasi terkait kasus pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti oleh pihak terkait	40%	65%	
			Jumlah rekomendasi hasil penyelidikan Komnas HAM terkait kasus pelanggaran HAM berat yang ditindaklanjuti Jaksa Agung	2	8 ^{KJ}	
			Prosentase kasus pelanggaran HAM yang diselesaikan melalui mekanisme mediasi	40%	85%	
			Prosentase pelaksanaan hasil mediasi kasus-kasus pelanggaran HAM	40%	75%	

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KOMNAS HAM

NO	PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
1.3	Pencegahan dan Penanggulangan Segala Bentuk Kekerasan terhadap Perempuan dan Pemenuhan Hak Korban	Terlaksananya kegiatan pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan pemenuhan hak korban	Tingkat pelibatan dan penyikapan aparat negara dalam upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan serta perlindungan, penegakan dan pemajuan HAM perempuan	30%	30%	52,4
			Tingkat pelibatan dan penyikapan masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan serta perlindungan, penegakan dan pemajuan HAM perempuan	50%	50%	
			Tingkat rekomendasi hasil pengkajian dan penelitian yang terkait dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan instrumen internasional yang relevan bagi perlindungan HAM perempuan	50%	50%	
			Jumlah pemantauan termasuk pencarian fakta dan pendokumentasian pelanggaran HAM perempuan	10	50 ^{k)}	
			Prosentase pengaduan pelanggaran HAM perempuan yang ditindaklanjuti	50%	50%	
			Prosentase pendampingan dan sistem pemulihan korban pelanggaran HAM yang dikembangkan	25%	75%	
			Prosentase jumlah mekanisme penyelesaian alternatif yang dikembangkan	25%	45%	

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KOMNAS HAM

NO	PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
			Prosentase pendokumentasian pelanggaran HAM yang terjadi	50%	90%	
			Presentase advokasi terhadap korban pelanggaran HAM	50%	50%	
			Meningkatnya fungsi kelembagaan Komnas Perempuan dalam rangka menciptakan lembaga yang independen, transparan, dan akuntabel dalam menjalankan mandat Komnas Perempuan.	20%	40%	
TOTAL ALOKASI KOMNAS HAM 2010-2014						323,8

K : Angka kumulatif 5 tahun (2010-2014)

TABEL 2.3
RENCANA TINDAK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH 2010-2014
PER KEMENTERIAN/LEMBAGA

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KOMNAS HAM

NO	PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
I	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Komnas HAM	Meningkatnya dukungan manajemen pelaksanaan tugas teknis Komnas HAM	Jumlah rekomendasi yang terkait dengan pembentukan, perubahan & pencabutan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan HAM	8	30 ^{K)}	323,8
			Tingkat pelibatan dan penyikapan aparat negara dalam upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan serta perlindungan, penegakan dan pemajuan HAM perempuan	30%	30%	
			Prosentase penanganan pengaduan kasus pelanggaran HAM yang disampaikan kepada Komnas HAM	80%	90%	
			Prosentase kasus pelanggaran HAM yang diselesaikan melalui mekanisme mediasi	40%	85%	
			Jumlah kesepakatan/MoU kerjasama dengan <i>stakeholder</i> dalam jangka waktu yang ditargetkan	12	60 ^{K)}	
1.1	Penguatan Kesadaran HAM Masyarakat dan Aparatur Negara.	Meningkatnya kesadaran HAM masyarakat dan aparaturnegara melalui penguatan peraturan perundang-undangan yang berperspektif HAM	Jumlah rekomendasi yang terkait dengan pembentukan, perubahan dan pencabutan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan HAM	8	30 ^{K)}	41,7
			Tingkat rekomendasi hasil pengkajian dan penelitian yang terkait dengan pembentukan, perubahan dan pencabutan peraturan perundang-undangan nasional serta ratifikasi instrumen HAM internasional	50%	80%	

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KOMNAS HAM

NO	PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
			Tingkat tindak lanjut dari rekomendasi hasil pengkajian dan penelitian yang terkait dengan pembentukan, perubahan & pencabutan peraturan perundang-undangan nasional serta ratifikasi instrumen HAM internasional	50%	75%	
			Tersedianya alat ukur pemenuhan HAM (hak dasar)	4	10	
			Meningkatnya kesadaran masyarakat dan aparaturnegara terhadap kegiatan pemajuan HAM melalui <i>klien feedback survey (jumlah survey)</i>	2	15 ^{KJ}	
			Prosentase kenaikan alumni pelatihan yang menjadi fasilitator HAM	5%	25%	
			Prosentase kenaikan pemahaman aparaturnegara terhadap ketaatan atas produk perundang-undangan yang berperspektif HAM.	10%	10%	
1.2	Peningkatan Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM	Terlaksananya penanganan dan penyelesaian kasus pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dan instansi terkait	Prosentase penanganan pengaduan kasus pelanggaran HAM yang disampaikan kepada Komnas HAM	80%	90%	58,3
			Tersedianya sistem pengaduan <i>online</i> dan <i>database</i> pengaduan (aplikasi)	1	1	
			Prosentase rekomendasi terkait kasus pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti oleh pihak terkait	40%	65%	
			Jumlah rekomendasi hasil penyelidikan Komnas HAM terkait kasus pelanggaran HAM berat yang ditindaklanjuti Jaksa Agung	2	8 ^{KJ}	
			Prosentase kasus pelanggaran HAM yang diselesaikan melalui mekanisme mediasi	40%	85%	
			Prosentase pelaksanaan hasil mediasi kasus-kasus pelanggaran HAM	40%	75%	

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KOMNAS HAM

NO	PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
1.3	Pencegahan dan Penanggulangan Segala Bentuk Kekerasan terhadap Perempuan dan Pemenuhan Hak Korban	Terlaksananya kegiatan pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan pemenuhan hak korban	Tingkat pelibatan dan penyikapan aparat negara dalam upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan serta perlindungan, penegakan dan pemajuan HAM perempuan	30%	30%	52,4
			Tingkat pelibatan dan penyikapan masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan serta perlindungan, penegakan dan pemajuan HAM perempuan	50%	50%	
			Tingkat rekomendasi hasil pengkajian dan penelitian yang terkait dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan instrumen internasional yang relevan bagi perlindungan HAM perempuan	50%	50%	
			Jumlah pemantauan termasuk pencarian fakta dan pendokumentasian pelanggaran HAM perempuan	10	50 ^{k)}	
			Prosentase pengaduan pelanggaran HAM perempuan yang ditindaklanjuti	50%	50%	
			Prosentase pendampingan dan sistem pemulihan korban pelanggaran HAM yang dikembangkan	25%	75%	
			Prosentase jumlah mekanisme penyelesaian alternatif yang dikembangkan	25%	45%	

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KOMNAS HAM

NO	PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
			Prosentase pendokumentasian pelanggaran HAM yang terjadi	50%	90%	
			Presentase advokasi terhadap korban pelanggaran HAM	50%	50%	
			Meningkatnya fungsi kelembagaan Komnas Perempuan dalam rangka menciptakan lembaga yang independen, transparan, dan akuntabel dalam menjalankan mandat Komnas Perempuan.	20%	40%	
TOTAL ALOKASI KOMNAS HAM 2010-2014						323,8

K : Angka kumulatif 5 tahun (2010-2014)

**RENCANA TINDAK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH 2010-2014
PER KEMENTERIAN/LEMBAGA**

KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
1	PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA					3.127,6
a	Pengelolaan Meteorologi Publik BMKG	Meningkatnya pelayanan data dan informasi meteorologi publik serta peringatan dini cuaca ekstrim	Persentase tingkat kemampuan pelayanan data dan informasi meteorologi publik	50%	80%	899,7
			Persentase tingkat kemampuan pelayanan data dan informasi potensi kebakaran hutan	50%	80%	
			Persentase tingkat kemampuan pelayanan data dan informasi cuaca ekstrim	50%	80%	
c	Pengelolaan Gempa Bumi dan Tsunami BMKG	Tersedianya kebijakan teknis dalam penanganan penyediaan informasi gempa bumi dan tsunami	Kesinambungan (sustainabilitas) Ina-TEWS	100%	100%	515,0
			Kesinambungan sistem pengamatan di bidang gempabumi dan tsunami	90%	80%	
			Kesinambungan sistem analisa data di bidang gempabumi dan tsunami	90%	90%	
d.	Pengelolaan Iklim Agroklimat dan Iklim Maritim BMKG	Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan data dan informasi di bidang iklim agroklimat dan iklim maritim	Jumlah pelayanan informasi perubahan iklim dan kualitas udara	75%	95%	151,6
			Persentase pengguna informasi perubahan iklim dan kualitas udara	75%	90%	

KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
e	Pengelolaan Perubahan Iklim dan Kualitas Udara BMKG	Tersedianya pelayanan data dan informasi di bidang perubahan iklim dan kualitas udara, serta kerjasama di tingkat nasional dan internasional terkait kegiatan di bidang perubahan iklim dan kualitas udara	Jumlah pelayanan informasi iklim agroklimat dan iklim maritim	70%	90%	46,0
			Persentase pengguna informasi perubahan iklim dan kualitas udara	65%	90%	
f.	Pengelolaan Meteorologi Penerbangan dan Maritim BMKG	Meningkatnya kualitas, kuantitas dan jangkauan pelayanan data, informasi dan jasa di bidang meteorologi penerbangan dan maritim	Persentase tingkat kemampuan pelayanan data dan informasi meteorologi maritim	40%	85%	395,4
			Persentase tingkat kemampuan pelayanan data dan informasi meteorologi penerbangan	40%	85%	
			Frekuensi pelayanan informasi meteorologi maritim	365	1460	
			Ketersediaan data meteorologi	680	890	
g.	Pengelolaan Seismologi Teknik, Geofisika Potensial dan Tanda Waktu BMKG	Tersedianya sarana dan prasarana untuk pengelolaan data dan informasi bidang seismologi teknik, geofisika potensial dan tanda waktu	Tersedianya peralatan pengamatan seismoteknik, geopotensial dan tanda waktu	40	300 ^{K)}	62,5
			Kesinambungan (sustainabilitas) sistem pengamatan, analisa, dan pelayanan dalam bidang seismoteknik, geopotensial, dan tanda waktu	90%	90%	
			Tersedianya data dan informasi dalam bentuk peta secara kumulatif dan bulletin di bidang seismoteknik, geopotensial, dan tanda waktu	90%	90%	
h	Pengelolaan Instrumentasi, Rekayasa dan Kalibrasi BMKG	Tersedianya kebijakan teknis bidang instrumentasi, rekayasa dan kalibrasi	Jumlah kebijakan teknis instrumentasi, rekayasa dan kalibrasi yang disusun	17	107 ^{K)}	172,9
			Persentase informasi pengelolaan instrumentasi, rekayasa dan kalibrasi secara maksimal	10%	30%	

KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
i	Pengelolaan Jaringan Komunikasi BMKG	Tersedianya kebijakan teknis bidang jaringan komunikasi	Jumlah kebijakan teknis jaringan komunikasi yang disusun	63%	100%	127,9
			Persentase informasi pengelolaan jaringan komunikasi	90%	90%	
j	Pengelolaan Data Base BMKG	Tersedianya mekanisme yang mengatur ketersediaan dan pengelolaan database	Jumlah kebijakan database yang disusun	11	86 ^{K)}	68,0
			Persentase informasi pengelolaan database secara maksimal	20%	100%	
k	Pengembangan UPT BMKG	Terbinanya pelaksanaan UPT BMKG	Persentase pembinaan dan pengembangan UPT BMKG seluruh Indonesia	80%	90%	688,7
2	DUKUNGAN MANAJEMEN DAN TUGAS TEKNIS LAINNYA BMKG					2.598,7
d.	Penelitian dan Pengembangan BMKG	Terselenggaranya penelitian dan pengembangan bidang meteorologi, klimatologi, kualitas udara dan geofisika	Jumlah penelitian dan pengembangan bidang meteorologi	0	75 ^{K)}	81,7
			Jumlah penelitian dan pengembangan bidang klimatologi	0	40 ^{K)}	
			Jumlah penelitian dan pengembangan bidang kualitas udara	0	16 ^{K)}	
			Jumlah penelitian dan pengembangan bidang geofisika	0	92 ^{K)}	
			Jumlah penelitian dan pengembangan yang digunakan dalam operasional	0	51 ^{K)}	
			Jumlah penelitian dan pengembangan yang di publikasikan	0	30 ^{K)}	
			Jumlah kerjasama penelitian dan pengembangan	0	34 ^{K)}	
TOTAL ALOKASI BMKG 2010-2014						5.726,3

K : Angka kumulatif 5 tahun (2010-2014)

**RENCANA TINDAK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH 2010-2014
PER KEMENTERIAN/LEMBAGA**

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KOMISI PEMILIHAN UMUM

NO	PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
I	Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik	Meningkatnya kapasitas dan kredibilitas organisasi penyelenggara pemilu dan pemilihan kepala daerah di KPU, KPU Provinsi, dan KPU kabupaten/kota	Prosentase penyiapan dan penyelenggaraan pemilu yang tepat waktu dan akuntabel (sesuai dengan peraturan perundangan).	-	85%	358,5
1.1	Penyiapan penyusunan rancangan peraturan KPU, advokasi, penyelesaian sengketa dan penyuluhan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu	Terselenggaranya penyiapan penyusunan rancangan peraturan KPU, advokasi hukum dan penyuluhannya	1. Tingkat ketepatan penyiapan analisis dan masukan rancangan verifikasi peraturan parpol, perseorangan peserta pemilu dan dana kampanye peserta pemilu, penyusunan dapil, dll 2. Tingkat ketepatan penyiapan penyusunan regulasi penyelenggaraan pemilu 2014 3. Tingkat ketepatan penyiapan penyusunan tata cara dan pelaksanaan advokasi dan penyelesaian sengketa hukum 4. Tingkat ketepatan penyiapan penyusunan dokumentasi dan informasi hukum peraturan perundangan dan pelaksanaan penyuluhan hukum	60% - 60% 60%	85% 85% 90% 90%	111,0
1.2	Pedoman, petunjuk teknis dan bimbingan teknis/supervisi/publikasi/sosialisasi penyelenggaraan pemilu dan pendidikan pemilih	Terselenggaranya bimbingan teknis/supervisi/publikasi/sosialisasi penyelenggaraan pemilu dan pendidikan pemilih	1. % pedoman dan petunjuk teknis bimbingan teknis penyelenggaraan pemilu yang diselesaikan tepat waktu dan akuntabel 2. % pedoman dan petunjuk teknis dalam rangka PAW anggota DPR, DPD, DPRD dan KPU yang diselesaikan dengan akuntabel dan tepat waktu 3. % fasilitasi bimbingan teknis (bimtek) pemilu kepala daerah untuk KPU prov/kab/kota, PPK, dan PPS yang tepat waktu, sesuai rencana dan efektif	60% 60% 75%	77,50% 77,50% 85%	247,5

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KOMISI PEMILIHAN UMUM

NO	PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
			4. % fasilitasi bimbingan teknis (bimtek) pemilu legislatif dan presiden untuk KPU prov/kab/kota, PPK dan PPS yang tepat waktu sesuai rencana dan efektif	-	85%	
			5. % kemajuan pengembangan pusat pendidikan pemilih	35%	100%	
			6. Jumlah modul pendidikan pemilih untuk kelompok perempuan, miskin, cacat, pemilih pemula, lansia	5	25 ^{K)}	
			7. Jumlah kerja sama dan kegiatan pendidikan pemilih yang dilaksanakan	-	40 media massa ^{K)} kerja sama dengan 1.000 OMS ^{K)} 40 kegiatan kemasyarakatan ^{K)}	
			8. % kemajuan pengembangan media center	60%	80%	
			9. Jumlah kegiatan pendidikan pemilih bagi caleg perempuan	-	40 ^{K)}	
			10. Jumlah kader parpol perempuan yang mendapatkan pendidikan politik	-	500 ^{K)}	
II	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Meningkatnya kualitas dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya	Prosentase penyelenggaraan dukungan manajemen yang profesional, akuntabel (sesuai dengan peraturan perundangan), efisien (tepat sasaran), dan efektif (tepat guna)	60%	77,5%	4.328,8
2.1	Pelaksanaan manajemen perencanaan dan data	Tersedianya dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga, data dan	1. Prosentase kesesuaian antara Renstra dan Renja K/L dan RKA KL	60%	77,50%	173,0
			2. % fasilitasi kerjasama KPU dengan lembaga lain	60%	77,50%	
			3. % laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	60%	77,50%	

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KOMISI PEMILIHAN UMUM

NO	PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITYAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
			4. % kemajuan penyusunan dan pelaksanaan model dan pedoman reformasi birokrasi dan tata kelola KPU	-	100%	
					(tersusunya model dan pedoman, serta penerapan)	
			5. Frekuensi pemutakhiran data pemilih di tingkat kelurahan di seluruh wilayah Indonesia	-	8 kali ^{K)}	
2.2	Pengelolaan data, dokumentasi, pengadaan, pendistribusian, dan inventarisasi sarana dan pra sarana pemilu	Terselenggaranya pengelolaan data, dokumentasi, pengadaan, pendistribusian, inventarisasi sarana dan pra sarana serta terpenuhinya logistik keperluan Pemilu.	1. Tingkat ketepatan pengelolaan informasi kebutuhan pemilu	-	90%	150,0
			2. Tingkat ketepatan pengadaan dan distribusi logistik pemilu	-	100%	
			3. Tingkat ketepatan standar mutu barang/jasa administrasi pengadaan dan dokumentasi pengadaan kebutuhan Pemilu	-	95%	
			4. % kemajuan penyusunan peta distribusi logistik pemilu	-	100%	
			5. Tingkat keberhasilan pemeliharaan sarana dan pra sarana pemilu	60%	77,5%	
III	Program Sarana dan Prasarana Aparatur	Memadainya sarana dan prasarana operasionalisasi KPU	Tingkat/ kesesuaian kebutuhan anggota dan staf KPU terhadap ketersediaan sarana dan prasarana KPU/KPU Prov/Kab/Kota dan sarana dan prasarana serta kendaraan operasional untuk daerah pemekaran	-	90%	745,0
TOTAL ALOKASI KPU 2010-2014						5.432,3

K : Angka kumulatif 5 tahun (2010-2014)

**RENCANA TINDAK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH 2010-2014
PER KEMENTERIAN/LEMBAGA**

KEMENTERIAN/LEMBAGA : MAHKAMAH KONSTITUSI

NO	PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
1	Program Penanganan Perkara Konstitusi	Penyelesaian perkara konstitusi yang tepat waktu, transparan dan akuntabel	<ul style="list-style-type: none"> · Prosentase perkara konstitusi yang diputus · Tersedianya biaya penanganan dan penyelesaian perkara yang memadai · Tersedianya satuan biaya penanganan perkara yang memadai · Terlaksananya administrasi perkara 	84%	91%	275,4
1.1	Penanganan Perkara PUU, SKLN, PHPU Legislatif, Pilpres, Pilgub, Pilbup, Walikota dan Perkara Lainnya	Terselesaikannya penyelesaian perkara yang tepat waktu, transparan dan akuntabel	<ul style="list-style-type: none"> · Jumlah perkara PUU/SKLN dan perkara lainnya yang diputus · Jumlah perkara pemilu legislatif/presiden/wapres yang diputus · Jumlah perkara pemilukada yang diputus 	60	280 ^{ki} 660 ^{ki}	275,4
2	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Teknis Lainnya Mahkamah Konstitusi RI	Tersedianya fasilitas sarana dan prasarana berbasis TI dalam penanganan perkara konstitusi	<ul style="list-style-type: none"> · Penyediaan sarana dan prasarana pendukung penanganan perkara konstitusi · Penyediaan informasi penanganan perkara konstitusi kepada masyarakat 	500	2.350 ^{ki}	605,1
2.1	Pelayanan Hubungan Masyarakat, Kerjasama, Keprotokolan dan Pengelolaan Teknologi Informasi	Tersedianya fasilitas sarana prasarana dalam penanganan perkara konstitusi	<ul style="list-style-type: none"> · Presentase informasi perkembangan penanganan perkara yang transparan dan akuntabel · Prosentase hasil putusan yang dapat diakses publik secara <i>online</i> 	100%	100%	55,0
2.2	Penyusunan Program, Rencana Kerja Anggaran, Pengelolaan Keuangan, dan Pengawasan	Tersusunnya rencana anggaran, pengelolaan anggaran dan pengawasan internal kelembagaan.	<ul style="list-style-type: none"> · Tersusunnya rincian satuan harga penanganan perkara yang ditangani Mahkamah Konstitusi 	1 Pkt	3 Pkt ^{ki}	0,9

KEMENTERIAN/LEMBAGA : MAHKAMAH KONSTITUSI

NO	PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
2.3	Penyelenggaraan Adm. Perkara, Persidangan, Putusan dan Hukum	Terselenggaranya manajemen administrasi perkara konstitusi	- Jumlah perkara yang diregisterasi dan tidak diregisterasi	560 pkr	3.290 ^K	162,2
			- Jumlah persidangan dalam penyelesaian perkara	960 sidang	4.800 ^K	
			- Jumlah risalah yang diselesaikan	960 risalah	4.800 ^K	
			- Jumlah salinan putusan yang disampaikan kepada para pihak dan masyarakat	92 putusan	497 ^K	
			- Jumlah pengaduan masyarakat yang ditangani dan ditindaklanjuti	60 pengaduan	760 ^K	
2.4	Pengelolaan Arsip, Pembinaan SDM dan Kerumahtanggaan	Terlaksananya manajemen arsip, SDM dan pengelolaan kelembagaan.	- Jumlah peserta dan target group diklat hukum acara Mahkamah Konstitusi	500 org	2.900 ^K	
			- Jumlah pegawai yang mengikuti diklat kepaniteraan	100 pegawai	600 ^K	
			- Jumlah pegawai yang mengikuti program rintisan gelar	24 pegawai	161 ^K	
			- Prosentase penyusunan analisis kebutuhan SDM	40%	100%	
			- Prosentase penerapan perekrutan pegawai baru sesuai dengan standar mutu organisasi internasional (ISO)	50%	100%	
			- Prosentase penyusunan analisa beban kerja unit kerja dan pegawai	60%	100%	
			- Prosentase penyempurnaan struktur organisasi	65%	100%	
3	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Konstitusi RI	Tersedianya fasilitas sarana dan prasarana dalam pelaksanaan tugas Mahkamah Konstitusi	- Penyediaan sarana dan prasarana penunjang penanganan perkara yang berbasis teknologi			163,6
3.1	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung	Pengembangan sistem informasi dalam penanganan perkara konstitusi	Jumlah pengembangan sistem informasi terkait dengan penanganan perkara	6 pkt	26 ^K	18,2
4	Program Kesadaran Berkonstitusi					172,8
TOTAL ALOKASI MAHKAMAH KONSTITUSI 2010-2014						1.216,9

K : Angka kumulatif 5 tahun (2010-2014)

**RENCANA TINDAK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH 2010-2014
PER KEMENTERIAN/LEMBAGA**

KEMENTERIAN/LEMBAGA: PUSAT PELAPORAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

No	PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
1.	Program Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Pendanaan Terorisme	Meningkatnya partisipasi pihak terkait dalam upaya pencegahan dan pemberantasan TPPU dan pendanaan terorisme di Indonesia.	1. Jumlah laporan hasil analisis yang disampaikan kepada penyidik dan instansi lainnya yang tidak dimintakan klarifikasi kembali. 2. Jumlah instansi dan Unit Intelijen Keuangan (<i>Financial Intelligence Unit - FIU</i>) yang secara formal melakukan kerjasama 3. Jumlah pelaksanaan audit kepatuhan terhadap Pihak Pelapor. 4. Jumlah pendapat dan bantuan hukum terkait masalah TPPU dan pendanaan terorisme maupun masalah terkait lainnya. 5. Jumlah kegiatan operasional dan infrastruktur PPATK dalam mengelola Teknologi Informasi (TI) PPATK yang sesuai dengan Jumlah Mutu Layanan yang Baku (<i>Service Level Guarantee - SLG</i>). 6. Tingkat pencapaian manajemen kualitas sistem TI PPATK sesuai standar internasional (standar Cobit PO8). 7. Jumlah pembuatan cetak biru Sistem Informasi. 8. Jumlah spesifikasi kebutuhan (<i>bussines process</i>) aplikasi yang dilakukan peng-coding-an (STR, CTR, CBCC). 9. Jumlah piranti lunak (<i>software</i>) aplikasi yang dipelihara.	250 Laporan	1.400 Laporan ^{K)}	229,9
			4 MOU	20 MOU ^{K)}		
			75 PJK	375 PJK ^{K)}		
			24 Dokumen	144 Dokumen ^{K)}		
			5 Kegiatan	31 Kegiatan ^{K)}		
			1.1. Level (Sesuai <i>Maturity Model</i>)	2 Level (Sesuai <i>Maturity Model</i>)		
			1 Dokumen	5 Dokumen ^{K)}		
			2 Aplikasi	9 Aplikasi ^{K)}		
			2 Aplikasi	12 Aplikasi ^{K)}		

KEMENTERIAN/LEMBAGA: PUSAT PELAPORAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

No	PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
a.	Pengembangan Riset dan Analisis Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan TPPU dan Pendanaan Terorisme	1. Hasil riset (analisis strategis, tipologi, dan statistik) yang berkualitas dalam upaya pencegahan dan pemberantasan TPPU dan pendanaan terorisme.	a. Jumlah laporan analisis strategis dan tipologi.	4 laporan	20 laporan ^{K1}	47,4
			b. Persentase informasi hasil riset yang dapat menggambarkan perkembangan, pemetaan, dan modus pencucian uang dan pendanaan terorisme di Indonesia.	100%	100%	
		2. Hasil analisis yang berkualitas dan bermanfaat bagi penyidik dan instansi pengguna lainnya terkait pencegahan dan pemberantasan TPPU dan pendanaan terorisme.	a. Jumlah laporan hasil analisis yang disampaikan kepada penyidik dan instansi lainnya.	250 laporan	1.400 laporan ^{K1}	
			b. Persentase hasil analisis awal terhadap seluruh LTKM yang diterima dan telah dikategorikan (<i>high, medium, low</i>).	85%	90%	
b.	Pelaksanaan Kerjasama Nasional dan Internasional di Bidang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU dan pendanaan terorisme.	1. Kerjasama dengan instansi dalam dan luar negeri sebagai upaya penguatan kebijakan anti pencucian uang dan pendanaan terorisme di Indonesia.	a. Jumlah instansi yang secara formal melakukan kerjasama dengan PPAATK dalam bentuk Nota Kesepakatan (MoU).	4 MOU	20 MOU ^{K1}	35,6
			b. Persentase terimplementasikannya kerjasama dengan instansi dalam negeri dalam upaya penguatan kebijakan anti pencucian uang dan pendanaan teroris di Indonesia.	70%	80%	
c.	Penelaahan dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pemberian pendapat dan bantuan hukum terkait TPPU dan pendanaan terorisme.	1. Pendapat dan bantuan hukum terkait TPPU dan pendanaan terorisme.	a. Jumlah dokumen pendapat hukum terkait masalah TPPU dan pendanaan teroris maupun masalah terkait lainnya.	24 dokumen	144 dokumen ^{K1}	32,9
			b. Persentase pemberian pendapat hukum terkait masalah TPPU dan pendanaan teroris maupun masalah terkait lainnya oleh internal dan eksternal PPAATK.	100%	100%	
		2. Rancangan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksana terkait masalah TPPU serta rancangan peraturan dan kebijakan internal PPAATK.	Jumlah rancangan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksana terkait masalah TPPU, pendanaan teroris dan masalah terkait lainnya serta rancangan peraturan dan kebijakan internal PPAATK terkait implementasi UU TPPU dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya	12 dokumen	72 dokumen ^{K1}	

KEMENTERIAN/LEMBAGA: PUSAT PELAPORAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

No	PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
d.	Pengawasan Kepatuhan terhadap Pihak Pelapor dalam menyampaikan kewajiban pelaporan ke PPATK.	Kepatuhan Pihak Pelapor dalam memenuhi kewajiban penyampaian laporan ke PPATK.	a. Jumlah pelaksanaan audit kepatuhan terhadap Pihak Pelapor. b. Persentase kesesuaian laporan yang diterima dari Pihak Pelapor dengan pedoman tata cara pelaporan.	75 PJK	375 PJK ^{K)}	12,5
2.	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya PPATK	Terpenuhinya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis PPATK yang berkualitas.				349,4
3.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur PPATK	Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk mendukung pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi PPATK.				77,4
TOTAL ALOKASI PPATK 2010-2014						656,7

K : Angka kumulatif 5 tahun (2010-2014)

**RENCANA TINDAK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH 2010-2014
PER KEMENTERIAN/LEMBAGA**

KEMENTERIAN/LEMBAGA : LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA (LIPI)

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
1	PROGRAM PENELITIAN, PENGUASAAN, DAN PEMANFAATAN IPTEK					2.355,3
a.	Pengembangan Sistem Dokumentasi dan Informasi Ilmiah	Terbangunnya pusat penelitian maju dan interdisipliner bertaraf internasional	Inisiasi LIPI International Center for Interdisciplinary and Advanced Research (ICIAR) International training-workshops, penelitian pasca sarjana tematis internasional, twinning institution	1	1	15,0
b.	Pengembangan Pranata Inovasi	Drafting paten dan pendaftaran HKI atas produk inovasi teknologi Kapitalisasi dan pemanfaatan paten serta invensi LIPI yang selama ini selama ini menjadi produk bernilai ekonomi yang bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat	Pendaftaran HKI Paket teknologi/HKI	20 3	27 4	8,2 8,7
c.	Pengembangan Sistem Dokumentasi dan Informasi Ilmiah	Terbangunnya teknopolis yang melibatkan kluster-kluster pengetahuan, pengembangan kawasan dan pelayanan jasa Tumbuhnya wirausahaan baru yang berbasis inovasi teknologi	dokumen Kajian substansi Teknopolis (master plan fisik) paket sarana dan prasarana kawasan teknopolis kajian/publikasi iptek, paket portal pengetahuan dan bibliotainment Database journal ilmiah Unit usaha UMKM inovatif baru teknologi/HKI LIPI yang diinkubasi tenant	1 2 2 1	 3 1 1 3 4 2	34,5

KEMENTERIAN/LEMBAGA : LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA (LIPI)

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
	Pengembangan Inovasi	Tumbuhnya wirausahaan baru yang berbasis inovasi teknologi	Unit usaha UMKM inovatif baru	2	3	
			teknologi/HKI LIPI yang diinkubasi	2	4	
			tenant	1	2	
d.	Penelitian dan Pengembangan KIM; Penelitian dan Penguatan Sistem Mutu dan Teknologi Pengujian	Terbangunnya infrastruktur system pengukuran (metrology), pengujian dan perangkat kalibrasi nasional	Lab terakreditasi,	2	2	20,0
			Sistem dan metoda uji	8	8	
			Prototip	5	5	
			Paket interlaboratory comparison	5	5	
			Publikasi ilmiah	40	40	
			Paket aplikasi e-commerce		1	
e.	Litbang Benih Unggul Berbasis Biologi Molekuler (PN5)	Benih unggul berbasis biologi molekuler	Jumlah varietas Benih unggul	1	4	45,0
	Litbang pupuk organik dari mikroba hayati Indonesia (PN5)	Pupuk organik dari mikroba hayati Indonesia	percontohan produksi pupuk organik di tk pedesaan	1		
			aplikasi pupuk organik pada paket <i>biovillage</i>		10	
	Litbang keanekaragaman pangan (PN5)	Keaneka-ragaman pangan	Jumlah varietas	2	2	
f.	Penelitian bioteknologi peternakan modern (PN5)	Terbangunnya fasilitas litbang bioteknologi peternakan modern	Fasilitas Laboratorium dan peralatannya	2		28,0
			Paket pengembangan program biotek peternakan		1	
g.	Penelitian Bioteknologi	Meningkatnya penguasaan dan pemanfaatan biologi molekuler dan bioteknologi	Publikasi ilmiah nasional	4	4	17,0
			Publikasi ilmiah internasional	1	1	
		Pengembangan Bioresource Centre dan Microbial Culture Collection	Pembenahan koleksi mikroba rujukan, bank biji, bank DNA, tissue culture, dan bank extract,	1		21,0
			Master plan fasilitas koleksi			
			Penambahan koleksi, data base, sistem pengelolaan bestandart nasional		1000	

KEMENTERIAN/LEMBAGA : LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA (LIPI)

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
h.	Penelitian Biologi	Informasi mikroorganisme dalam habitat alam dan dinamikanya, serta Pemanfaatan genetik mikroorganisme untuk mendegradasi polutan, dan Terbangunnya infrastruktur pengamanan plasma nutfah	Publikasi ilmiah	10	10	20,5
			isolat mikroba	10	10	
			prototipe	2	2	
			paket teknologi	1	1	
			paten		1	
			plasma nutfah	10	10	
		Terkelolanya koleksi spesimen flora dan fauna hidup maupun awetan	Penambahan koleksi rujukan flora dan fauna, ,data base, sistem pengelolaan berstandart internasional (spesimen)	30.000	30.000	31,5
			paket fasilitas depositori	2	2	
i.	Penelitian Molecular Farming dan Bahan Baku Obat	Pengembangan bahan obat berbasis bahan alam dan biologi molekular	Jenis bahan obat	3	3	26,0
j.	Pengembangan Konservasi Tumbuhan Indonesia (Kebun Raya Bogor; Pengembangan Konservasi Kebun Raya Cibodas; Pengembangan Konservasi Kebun Raya Purwodadi; Pengembangan Konservasi Kebun Raya Bali)	Terlaksananya fungsi kebun raya sebagai tempat konservasi eksitu	Paket Laporan O&M kebun raya LIPI	4	4	25,0
k.	Pengembangan Konservasi Tumbuhan Indonesia - Kebun Raya Bogor	Konservasi ex-situ dalam bentuk kebun raya daerah	kebun raya (paket kawasan)	2	4	25,0
l.	Penelitian Oceanografi	Data potensi bahan obat dari makro algae dan sponge; biota laut potensial, terumbu karang; abalon, dan rajungan; serta sistem informasi oseanografi.	Publikasi makalah	37	58	62,0
			Prototipe	7	10	
			Konsep	6	8	
m.	Penelitian Oceanografi (PN 9)	Panduan dan sosialisasi kesiapsiagaan masyarakat pesisir	paket	2	2	17,0
			Pengembangan Sistem Informasi dan penelitian Kerusakan terumbu karang	Paket informasi dasar	3	3

KEMENTERIAN/LEMBAGA : LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA (LIPI)

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
n.	Penelitian Konversi Energi (PN 8)	Demo <i>pilot plant bio-gasoline</i> dari ligno selulosa	paket	1	1	21,3
		Standardisasi teknologi pengujian konversi energi	paket	1	1	
o.	Penelitian Energi Baru dan Terbarukan	Peningkatan kemampuan nasional dalam mengembangkan dan memanfaatkan sumber-sumber energi baru dan terbarukan (fuelcell, biofuel, sel surya)	Prototype pembangkit energi	1	2	54,7
p.	Penelitian material maju dan nanoteknologi	Pengembangan produk komponen berbasis magnet dan polimer	Paket komponen	2	4	40,5
q.	Litbang Teknologi Pertahanan Keamanan	Terbangunnya kemampuan di dalam negeri dalam upaya merancang, membuat dan mengoperasikan dan menguji sendiri	metoda, prototipe	1	2	24,0
			sistem uji safety reliability dan fungsi (paket)	1	1	
r.	Penelitian elektronika dan telekomunikasi	Pengembangan dan pemasangan radar pengintai (<i>surveillance radar</i>) di perairan Indonesia	Prototipe Radar (seri 0)	1		10,2
			Prototipe Mobile Radar (seri 0), jaringan Radar terkoneksi			
			litbang <i>air surveillance</i> radar			
			prototipe <i>air surveillance</i> radar			
			pengembangan <i>life detector radar</i>		1	
s.	Penelitian Tenaga listrik dan mekatronik; Penelitian elektronika dan telekomunikasi; Penelitian Informatika,	Membangun kemampuan perancangan dan rekayasa di dalam negeri	Prototipe	5	7	15,5
			Publikasi Ilmiah	8	10	
			Jumlah Paten			
			Teknologi Proses		2	
t.	Penelitian Informatika	Pengembangan produk <i>open source</i> untuk pelaksanaan <i>e-government</i>	paket	1	1	10,0
u.	Penelitian Geoteknologi	Dokumen ilmiah kontribusi Indonesia untuk perubahan iklim	Paket pengumpulan data	1		10,0
			Paket dokumen ilmiah		Final	

KEMENTERIAN/LEMBAGA : LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA (LIPI)

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
v.	Penelitian Geoteknologi	Konsep pengurangan resiko bencana kebumihan dan perubahan iklim	publikasi nasional	10	20	25,3
			prosiding	20	20	
			publikasi internasional		3	
			konsep tataruang		4	
w.	Penelitian Limnologi (Sumber Daya Perairan Darat)	Konsep pengelolaan serta mitigasi dan adaptasi bencana dan perubahan iklim global pada sumber daya perairan darat	makalah ilmiah internasional	2	4	25,0
			makalah ilmiah nasional	11	15	
			rekomendasi	1	2	
			prototipe	3	5	
x.	- Penelitian Kependudukan - Penelitian politik - Penelitian Sumber Daya Regional - Penelitian masyarakat dan budaya - Penelitian Ekonomi	Terwujudnya penguasaan, pengembangan, dan penerapan iptek dalam ilmu-ilmu sosial, inovasi-ekonomi, budaya, perilaku dan kognitif, serta hukum dan politik	Kajian	17	17	46,5
			Makalah/ publikasi ilmiah	40	40	
y.	Litbang Ilmu Pengetahuan Sosial dan Kebudayaan	Kajian ilmu sosial & kemanusiaan untuk keutuhan NKRI	paket kebijakan	1	1	6,5
		Ketahanan dan daya saing wilayah serta masyarakat pesisir	paket	1	1	24,5
z.	Pengembangan dan perlindungan kekayaan budaya (PN11)	Pengembangan dan perlindungan kekayaan budaya (pencegahan kepunahan bahasa masyarakat lokal)	paket	1	1	13,1
2	PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA					393,6
a.	Perencanaan, Penganggaran, Verifikasi dan Pembendaharaan Penataan, Pengembangan Organisasi dan SDM	Terbangunnya tatakelola litbang yang efisien dan efektif, yang mampu mendorong kreatifitas dan profesionalisme peneliti	Paket sistem pengelolalan keuangan, perencanaan dan penganggaran,	3	3	45,7
			Paket kebijakan reformasi birokrasi	1	1	
			Paket sistem seleksi proposal kompetitif	1	1	

KEMENTERIAN/LEMBAGA : LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA (LIPI)

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
b.	Pengembangan jaringan kerjasama penelitian dan Pemasarakatan Iptek	Meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya iptek	Kegiatan sosialisasi	10	10	10,8
			Kegiatan pembinaan	12	12	
			Kegiatan temu ilmiah	2	2	
		Meningkatnya kerjasama antar lembaga litbang dan antara lemlit dengan perguruan tinggi	Jejaring terbangun terkait focal point nasional	7	10	14,0
c.	Kerjasama Pemanfaatan Iptek	Aplikasi dan diseminasi Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk peningkatan produktivitas usaha berbasis teknologi di daerah.	Paket kerjasama	1	1	82,0
			Wilayah aplikasi TTG	5	5	
d.	Penatausahaan, pengadaan, pemeliharaan sarana dan prasarana	Meningkatnya kualitas fasilitas-fasilitas riset yang ada	Jumlah UKM terbina	40	40	47,5
			paket Rehabilitasi infrastruktur sarana dan prasarana Gatot Subroto	1		
e.	Pembinaan, Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan Peneliti	Terbangunnya sumberdaya yang kompeten dan memenuhi kebutuhan dalam perkembangan Iptek;	paket Rehabilitasi infrastruktur sarana dan prasarana LIPI, termasuk jaringan internet		1	21,0
			Angkatan diklat	24	25	
f.	Penataan, Pengembangan Organisasi dan SDM	Peneliti yang mengikuti pendidikan S2 dan S3	Paket Peraturan/kajian Peneliti	1	1	17,0
			Jumlah Peneliti S2 (Kumulatif)	10	20	
g.	Pengukuran dan Penelitian Perkembangan Iptek	Tersusunnya konsep dan rancangan pembangunan kebijakan Iptek Nasional yang tepat	Jumlah peneliti S3 (Kumulatif)	2	5	30,0
			Jumlah Publikasi ilmiah, termasuk buku indikator iptek	3	3	
3	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR LIPI					83,8
4	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR					191,1
5	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN LIPI					79,5
6	PROGRAM PENGAWASAN DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS LIPI					19,3
TOTAL ALOKASI LIPI 2010-2014						3.122,6

K : Angka kumulatif 5 tahun (2010-2014)

**RENCANA TINDAK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH 2010-2014
PER KEMENTERIAN/LEMBAGA**

KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL (BATAN)

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
1	PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA					469,6
a.	Pelaksanaan Standardisasi Iptek Nuklir	Diperolehnya Standardisasi, akreditasi dan sertifikasi serta jaminan mutu Iptek Nuklir	Usulan SNI bidang nuklir	3	3	6,6
			Jumlah Standar BATAN (SB)	1	2	
			% akreditasi laboratorium BATAN	40	100	
			% sertifikasi sistem mutu	50	100	
b.	Penyelenggaraan Pendidikan Teknologi Nuklir	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pendidikan teknologi nuklir	Jumlah lulusan	120	75	20,0
			Jumlah makalah nasional	15	25	
			Jumlah makalah internasional	3	5	
c.	Peningkatan Kemitraan Teknologi Nuklir	Diperolehnya mitra komersial yang memanfaatkan hasil litbang iptek nuklir	Jumlah hasil litbang yang dikomersialisasikan	2	2	9,6
			Jumlah mitra komersial	3	3	
2	PROGRAM PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENERAPAN ENERGI NUKLIR, ISOTOP DAN RADIASI					2.662,0
a.	Pengembangan Aplikasi Teknologi Isotop dan Radiasi (PN 5)	Peningkatan upaya penelitian dan pengembangan bidang pertanian yang mampu menciptakan benih unggul dan hasil penelitian lainnya menuju kualitas dan produktivitas hasil pertanian nasional yang tinggi.	varietas padi (padi sawah, padi gogo, padi dataran tinggi dan padi hibrida)		3	21,0
			varietas kedelai (jenis biji besar, genjah, produksi tinggi dan jenis biji hitam)	1	1	
			varietas kacang tanah dan kacang hijau		1	
			varietas gandum tropis dan sorghum	1	2	

KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL (BATAN)

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
b.	Penyusunan Pedoman Infrastruktur Dasar Pendukung Program Energi Nuklir Nasional (PN 8)	Peningkatan pemanfaatan energi terbarukan termasuk energi alternatif <i>geothermal</i> sehingga mencapai 2.000 MW pada 2012 dan 5.000 MW pada 2014 dan dimulainya produksi <i>coal bed methane</i> untuk membangkitkan listrik pada 2011 disertai pemanfaatan potensi tenaga surya, <i>microhydro</i> , dan nuklir secara bertahap.	Paket Penyiapan Infrastruktur Tapak PLTN dan Penyusunan Detail Desain	1	1	453,6
	Diseminasi Hasil Litbang Iptek Nuklir (PN 8)		Paket Sosialisasi PLTN (media), advokasi masyarakat, dunia usaha dan stakeholder yang terkait lainnya untuk persiapan implementasi program PLTN	3	3	138,0
c.	Pengembangan Teknologi Bahan Industri Nuklir	Diperolehnya Bahan unggul Magnetik untuk Aplikasi Diagnostik	Dokumen teknis	1		13,6
			Protoipe bahan unggul		1	
			Publikasi ilmiah	7	7	
d.	Pengembangan Teknologi Akselerator	Diperolehnya Desain Mesin berkas elektron untuk industri berbasis lateks karet alam dan rancangan detil siklotron 13 MeV untuk pembuatan radiofarmaka dan pengembangan obat	Prototipe Mesin Berkas Elektron	1		17,6
			Dokumen teknis siklotron 13 MeV	1	1	
			Publikasi Ilmiah	6	7	
e.	Pengembangan Teknologi Biomedika Nuklir, Keselamatan dan Metrologi Radiasi	Diperolehnya paket teknologi penatalaksanaan kanker payudara, dan serviks, bahan vaksin malaria tropika (<i>Plasmodium falciparum</i>), metode standarisasi dan kalibrasi radiasi	Dokumen teknis/metode	4		32,0
			Paket teknologi penatalaksanaan kanker payudara, dan serviks		1	
			Bahan vaksin		1	
			Prototipe sistem <i>carbone monitoring dan sistem</i> deteksi kontaminasi internal		2	
f.	Pengembangan Eksplorasi dan Teknologi Pengelolaan Bahan Galian Nuklir	Diperolehnya data sumberdaya U dan Thorium di Indonesia serta pengembangan teknologi pengolahan bijih uranium dan thorium	Data Teknis potensi Th dan U di Indonesia,	1	1	26,5
			Dokumen teknis pemurnian bijih Uranium	1		
			Paket teknologi pengolahan bijih uranium dan thorium		1	
			Publikasi ilmiah	4	4	
g.	Pengembangan Teknologi Bahan Bakar Nuklir	Diperolehnya paket teknologi penguasaan dan fabrikasi bahan bakar PWR serta dokumen rekayasa pabrik konversi bahan bakar nuklir	Dokumen Teknis	3	1	16,9
			Paket teknologi		2	
			Publikasi ilmiah	3	3	

KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL (BATAN)

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
h.	Pengembangan Teknologi Pengelolaan Limbah Radioaktif dan Lingkungan	Diperolehnya Paket teknologi Pengelolaan Limbah Radioaktif dan Pra rancangan instalasi pengolah limbah cair padat yang dihasilkan dari operasi PLTN.	Dokumen Teknis	4	2	20,3
			Paket Teknologi	1	1	
			Pototipe		1	
			Publikasi ilmiah	4	4	
i.	Pengembangan Perekayasa Perangkat Nuklir	Diperolehnya paket pengembangan teknologi rekayasa perangkat nuklir untuk kesehatan, industri dan sistem kendali reaktor	Prototipe Perangkat Nuklir untuk kesehatan	4	3	20,3
			Prototipe Perangkat Nuklir untuk industri	1	1	
			Prototipe Perangkat Nuklir untuk sistem kendali reaktor	1	1	
			Publikasi ilmiah	6	4	
j.	Pengembangan Teknologi dan Keselamatan Reaktor Nuklir	Diperolehnya Desain konseptual reaktor riset inovatif; desain konseptual reaktor daya maju kogenerasi serta Evaluasi teknologi, keselamatan dan keandalan reaktor daya PWR	Data Teknis	3	3	19,1
			Desain konseptual reaktor riset dan daya		1	
			Publikasi ilmiah	3	3	
k.	Pengembangan Aplikasi Teknologi Isotop dan Radiasi	Diperolehnya Aplikasi teknologi isotop dan radiasi di bidang peternakan, kesehatan dan industri	Paket Teknologi	4	4	50,4
			Publikasi DN	10	10	
			Publikasi LN	2	2	
l.	Pengembangan Teknologi Produksi Radioisotop dan Radiofarmaka	Diperolehnya paket pengembangan teknologi produksi radioisotop dan radiofarmaka	Paket teknologi produksi radioisotop	1	1	24,6
			Paket teknologi produksi radiofarmaka	1	1	
			Paten		1	
			Publikasi DN	10	10	
			Publikasi LN	2	2	
TOTAL ALOKASI BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL (BATAN) 2010-2014						3.131,5

K : Angka kumulatif 5 tahun (2010-2014)

**RENCANA TINDAK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH 2010-2014
PER KEMENTERIAN/LEMBAGA**

KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI (BPPT)

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
1	PROGRAM PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI					1.090,2
a.	Pengkajian dan Penerapan Audit Teknologi (PN11)	Termanfaatannya Audit Teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas litbang	Paket rekomendasi, advokasi, survei dan konsultasi mengenai audit teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas litbang	3	3	26,0
b.	Pengkajian dan Penerapan Inkubasi Teknologi (PN11)	Termanfaatannya inkubasi teknologi untuk terbangunnya sinergi antara lembaga litbangyasa, industri dan pemerintah	Paket rekomendasi, advokasi, sruvei dan konsultasi mengenai inkubasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas litbang dan terbangunnya sinergi antara lembaga litbangyasa, industri dan pemerintah	3	3	65,4
c.	Pengkajian dan Penerapan Kebijakan Teknologi	Termanfaatannya kebijakan inovasi teknologi untuk meningkatnya efisiensi dan efektivitas litbang	Paket rekomendasi, advokasi, sruvei dan konsultasi kebijakan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas litbang	1	1	15,2
d.	Pengembangan Teknologi Pembenihan Ikan Nila Unggul	Termanfaatannya teknologi produksi benih unggul ikan nila untuk mendukung ketahanan pangan	Prototipe Rekomendasi dan alih teknologi Kajian ikan Prototipe ikan Rekomendasi dan alih teknologi	1	1	6,0
e.	Pengembangan Teknologi Pengolahan Hasil Perikanan dan Peternakan;	Termanfaatannya teknologi pengolahan hasil ikan dan ternak untuk mendukung ketahanan pangan	Sejumlah rekomendasi, alih teknologi, prototipe, pengujian pada pengolahan hasil ikan dan ternak (paket prototype)	4	2	6,8
f.	Bioremediasi Lahan Pertanian di Pulau Jawa,	Termanfaatannya teknologi bioremediasi lahan pertanian untuk mendukung ketahanan pangan	Kajian Bioremediasi Lahan Pertanian di Pulau Jawa Proto tipe, pengujian Bioremediasi Lahan Pertanian di Pulau Jawa Rekomendasi dan Alih teknologi Bioremediasi Lahan		3	6,5

KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI (BPPT)

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
g.	Teknologi hyperspectral untuk pemetaan sentra produksi pertanian	Termanfaatkannya Teknologi hyperspectral untuk pemetaan sentra produksi pertanian untuk mendukung ketahanan pangan	Rekomendasi mengenai sentra-sentra produksi pertanian	1	1	5,0
h.	Pengkajian dan Penerapan Teknologi Produksi Obat Generik dan Obat Herbal	Termanfaatkannya teknologi farmasi dan medika untuk kesehatan.	rekomendasi, prototipe, bibit unggul Rekomendasi alih teknologi dan pengujian untuk teknologi farmasi dan medika Prototipe produk bahan farmasi (probiotik) Rekomendasi alat medis	1	1	25,5
i.	Pengembangan Pupuk Berimbang (PN 5)	Termanfaatkannya teknologi pupuk berimbang untuk mendukung ketahanan pangan	Survei, pilot plant Pilot project, peng-ujian Pilot plant, biofer-tilizer Pengujian, alih tekn Rekomendasi	1	1	79,0
j.	Pengembangan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan Tsunami Buoy dalam Program Nasional InaTEWS	Termanfaatkannya teknologi survei kelautan untuk lingkungan hidup dan pengelolaan bencana, ketahanan pangan, infrastruktur dan energi kelautan.	Terlaksananya pemeliharaan, pemanfaatan dan pengembangan Pilot Plant Tsunami Buoy dalam program nasional InaTEWS (Jumlah buoy)	9	17	36,5
k.	Pengembangan PLTP Skala Kecil (PN 8)	Termanfaatkannya sistem teknologi pembangkit listrik	Jumlah prototype, alih teknologi sistem dan komponen	1	2	177,0
l.	Teknologi Efisiensi Pemanfaatan Sumberdaya Air (PN 10)	Termanfaatkannya teknologi efisiensi pemanfaatan sumberdaya air di daerah tertinggal	Rekomendasi dan pilot plant untuk pemanfaatan sumberdaya air	1	1	6,3
m.	Pengkajian dan Penerapan Teknologi Energi Bersih	Termanfaatkannya sistem teknologi pembangkit listrik skala kecil, aplikasi teknologi kualitas daya sistem energi, serta penerapan teknologi dan sistem konservasi energi [ada peralatan dan pemanfaatan energi kandungan komponen dalam negeri semaksimal mungkin	alih tekno- logi 2 MW alih tekno- logi PLTP Conden- sing %MW alih tekno- logi, pilot plant binarycycle 100kw alih tekno- logi, binarycycle 1 MW pilot plant binary cycle 1 Mw dan sertifi- kasi Jumlah HAKI, prototipe, rekomendasi, pilot plant, paper, Studi Kelayakan, hasil pengujian, dan PNPB teknologi Gasifikasi Batubara/ Biomasa Jumlah kajian desain & aplikasi, prototyping, studi kelayakan, rekomendasi kebijakan danpelaksanaan, dan intermediasi teknologi energi terbarukan, energy fosil dan efisiensi energy (paket)	1 1 kajian	 1 1 FS	23,0 22,5 31,0

KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN PENGAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI (BPPT)

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
n.	Pemanfaatan Dimethyl Ether (DME) sebagai bahan bakar rumah tangga	Termanfaatkannya DME pada pengembangan energi alternatif	rekomendasi pada DME untuk alternatif energi pilot project pada DME untuk alternatif energi	1	1	10,5 -
o.	Pengembangan listrik tenaga surya	Termanfaatkannya listrik tenaga surya	rekomendasi dan pilot plant	1	1	9,0
p.	Pengkajian dan Penerapan Teknologi Informasi untuk Pemerintahan dan Industri	Termanfaatkannya dan Terkuasainya kemampuan rekayasa di bidang teknologi informasi dan komunikasi	Prototipe, alih teknologi, pengujian untuk pendukung transportasi dan pemerintahan pada transportasi udara, sistem informasi dan akuntansi, jaringan infostructure	2 proto tipe,	2 proto tipe, uji pakai	56,5
q.	Pengkajian dan Penerapan Teknologi Untuk Transportasi Masal	Termanfaatkannya teknologi transportasi untuk transportasi massal	Jumlah alih teknologi, rekomendasi, prototipe, pengujian dan jasa operasional pada perkereta-apian dan otomotif	2 rekmd	2 kon sults, rekmd, uji coba	39,2
r.	Pengkajian dan Penerapan Teknologi Manufaktur untuk Teknologi Energi, Pangan, Transportasi,	Termanfaatkannya Teknologi Manufaktur untuk Teknologi Energi, Pangan, Transportasi, Kesehatan, dan	Jumlah rekomendasi, alih teknologi, advokasi, konsultasi, prototipe, mini plant pada otomasi industri	3 advo kasi, rekmd	3 Proto tipe, alih tekn, advo	34,5
s.	Pengkajian dan Penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi (PN11)	Terkuasainya kemampuan rekayasa di bidang teknologi informasi dan komunikasi yang menunjang prioritas	Terbangun dan termanfaatkannya prototipe Perangkat PC USG Multi Chanel, Perangkat Lunak Free-Open Source	3	3	30,0
t.	Teknologi Komunikasi dan Sistem Informasi (ICT) pertanian	Termanfaatkannya teknologi informasi dan komunikasi pada pertanian untuk mendukung ketahanan pangan	Prototipe untuk penerapan sistem informasi dan komunikasi untuk pertanian Rekomendasi untuk penerapan sistem informasi dan	1	1	3,5 0
u.	Teknologi Pengendalian dan Mitigasi Dampak Pemanasan Global (PN 9)	Termanfaatkannya neraca karbon dan rekomendasi penurunan carbon pada sektor pertanian, kehutanan, lahan basah. Model fisik kolamkultur penyerap CO2. Penyempurnaan dan pengujian peralatan produksi flare	Rekomendasi kebijakan pengurangan emisi dan peningkatan carbon sink dan Pilot plant fotobioreaktor untuk penyerap CO2 (paket rekomendasi dan model)	1	1	14,85
v.	Pengkajian dan Penerapan Teknologi Industri Pertahanan	Termanfaatkannya teknologi pertahanan, keamanan dan keselamatan	Prototipe pesawat udara nir awak rekomendasi	1	1	10,0
w.	Peningkatan Kemandirian daya Saing Industri dan UMKM Berbasis Teknologi	Terbangunnya keterkaitan antar lembaga litbang, antar lemlit dengan perguruan tinggi, dan antara lemlit dengan industri dan masyarakat pengguna.	Terlaksanakannya pelayanan teknologi berupa rekomendasi, alih teknologi, survei, konsultasi dan advokasi pada bidang kebijakan teknologi (paket)	1	1	18,4

KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI (BPPT)

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
2	PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN TEKNIS LAINNYA					2.125,5
3	PROGRAM PENINGKATAN SARANA PRASARANA APARATUR BPPT					356,6
a.	Peningkatan dan Pembangunan Laboratorium BPPT Terpadu	Termafaatkannya laboratorium BPPT terpadu untuk mendukung sistem inovasi nasional dan P3IPTEK	Laboratorium dari Kluster I s/d VI untuk : Transportasi & Produksi, Material, Proses & Konstruksi, Hankam & ICT, GeosTech, Energi serta Fasilitas lain	1	1	356,6
TOTAL ALOKASI BPPT 2010-2014						3.572,3

K : Angka kumulatif 5 tahun (2010-2014)

**RENCANA TINDAK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH 2010-2014
PER KEMENTERIAN/LEMBAGA**

KEMENTERIAN/LEMBAGA : BAKOSURTANAL

NO	PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
1	PROGRAM SURVEI DAN PEMETAAN NASIONAL	Meningkatnya Pemanfaatan Peta Dasar Dalam Mendukung Pembangunan Nasional.	Jumlah dokumen Kebijakan Pemetaan Dasar Rupabumi, Jumlah Peta Dasar Nasional Matra Darat, Lautan Dan Udara, Serta Batas Wilayah.	3	15 ^{ki}	2.049,1
		Memperluas pemanfaatan data dan informasi spasial tematik hasil survei SDA dan LH untuk pengelolaan sumber daya alam dan perlindungan fungsi lingkungan hidup yang berkelanjutan.	Jumlah dokumen data dan informasi spasial SDA dan LH tematik matra darat.	3	15 ^{ki}	
			Jumlah dokumen data dan informasi spasial SDA dan LH tematik matra laut.	3	15 ^{ki}	
			Jumlah dokumen data dan informasi atlas serta pengembangan wilayah.	3	15 ^{ki}	
		Tertatanya Penyelenggaraan Survei dan Pemetaan Di Bidang Sistem Jaringan dan Standardisasi data Spasial Serta Survei Geodesi dan Geodinamika.	Jumlah dokumen koordinasi pelaksanaan di bidang sistem jaringan dan standarisasi data spasial.	2	10 ^{ki}	
			Jumlah dokumen koordinasi pelaksanaan di bidang survei geodesi dan geodinamika.	2	10 ^{ki}	
A	Pemetaan Dasar Rupabumi dan Tata Ruang.	Kebijakan pemetaan dasar rupabumi dan meningkatnya jumlah cakupan peta rupabumi Indonesia.	Jumlah Nomor Lembar Peta (NLP) Peta Rupabumi skala 1:10.000 (Sumatera & selatan Jawa).	90	724 ^{ki}	532,6
			Jumlah NLP Peta Rupabumi skala 1:50.000 wilayah gap.	160	1.490 ^{ki}	
			Jumlah NLP Peta Rupabumi skala 1:250.000 wilayah gap.	0	60 ^{ki}	
			Jumlah NLP Basis Data Geospasial skala 1:10.000 (Sumatera & selatan Jawa), 1:50.000, dan 1:250.000.	250	2.274 ^{ki}	
			Jumlah Dokumen Norma Spesifikasi Pedoman Kriteria (NSPK)	5	25 ^{ki}	
			Jumlah dokumen pelaksanaan Koordinasi penyelenggaraan Pemetaan Dasar Rupabumi dan Tata Ruang.	5	25 ^{ki}	
			Jumlah NLP gasetir dan model penataan ruang provinsi.	400	2.000 ^{ki}	

KEMENTERIAN/LEMBAGA : BAKOSURTANAL

NO	PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
B	Pemetaan Dasar Kelautan dan Kedirgantaraan.	Kebijakan pemetaan dasar kelautan dan kedirgantaraan serta meningkatnya cakupan peta dasar kelautan dan kedirgantaraan.	Kualitas kerjasama, sinergi, koordinasi, program dan kegiatan, serta diseminasi data spasial kelautan dan kedirgantaraan nasional.	2	10 ^{K)}	109,7
			Survei batimetri lepas pantai line km	13.680	68.400 ^{K)}	
			Jumlah liputan data spasial batimetri, Pantai (LPI) dalam ln km	34.000	265.000 ^{K)}	
			Percepatan Survei Hidrografi pantai multibeam line km	30.000	225.000 ^{K)}	
			Jumlah NLP Peta LPI skala 1:25K, 1:50K, 1:250K dan LLN 1:500K	52	292 ^{K)}	
			Jumlah liputan peta dasar kelautan dan kedirgantaraan dan basis data kelautan dan kedirgantaraan	1	5 ^{K)}	
			Pemutakhiran peta dasar kelautan dan kedirgantaraan serta basis data kelautan dan kedirgantaraan	4	41 ^{K)}	
			Pembuatan Peta LBI	2	15 ^{K)}	
			Pembuatan peta navigasi udara (Aeronautical Chart)	8	51 ^{K)}	
			Peta Resmi tingkat peringatan tsunami	2	16 ^{K)}	
C	Pemetaan Batas Wilayah.	Kebijakan pemetaan batas wilayah dan meningkatnya cakupan peta batas wilayah.	Jumlah NLP Peta batas wilayah negara (joint Mapping) koridor perbatasan darat RI-PNG, RI-Malaysia skala 1:50.000	0	44 ^{K)}	89,6
			Jumlah NLP pemetaan kecamatan kawasan perbatasan darat RI-PNG, RI-Malaysia, dan RI-RDTL skala 1:50.000 serta skala 1:25.000	72	161 ^{K)}	
			Jumlah pulau pemetaan pulau-pulau terluar	25	58 ^{K)}	
			Jumlah daerah penataan batas provinsi/kab/kota	0	36 ^{K)}	
			Jumlah wilayah dalam pemetaan wilayah provinsi	0	33 ^{K)}	
			Jumlah wilayah dalam pemetaan wilayah kabupaten	40	397 ^{K)}	
			Jumlah wilayah dalam pemetaan wilayah kota	0	98 ^{K)}	
			Jumlah (Border Sign Post) BSP RI-RDTL	0	240 ^{K)}	

KEMENTERIAN/LEMBAGA : BAKOSURTANAL

NO	PROGRAM/KEGIATAN PRIORITYAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
			Jumlah Perapatan pilar batas RI-Malaysia	22	110 ^{K)}	
			Jumlah Perapatan pilar batas RI-PNG	0	20 ^{K)}	
			Jumlah Perapatan pilar batas RI-RDTL	60	300 ^{K)}	
			Jumlah dokumen perundingan teknis batas darat	3	15 ^{K)}	
			Jumlah dokumen perundingan teknis batas maritim	3	17 ^{K)}	
			Jumlah dokumen kajian LKI>200 NM	1	6 ^{K)}	
			Jumlah dokumen pengkajian dan pemetaan batas negara dan geopolitik	1	5 ^{K)}	
			Jumlah NLP penyusunan dan pemeliharaan basisdata batas wilayah	110	1.130 ^{K)}	
D	Peningkatan Ketersediaan Data Dan Informasi Survei Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup Matra Darat.	Tersedianya data dan informasi spasial SDA dan LH tematik matra darat.	Jumlah dokumen rumusan kebijakan dan NSPK survei dan pemetaan SDA dan LH tematik matra darat.	1	5 ^{K)}	63,8
			Jumlah NLP produk inventarisasi, neraca, kebencanaan, kajian aplikasi tekno surta, remote sensing, dinamika geografis dan kajian wilayah. SDA dan LH matra darat yang diatur dan dikelola sebagai basis data pemetaan nasional.	25	225 ^{K)}	
			Jumlah dokumen database SDA darat.	1	5 ^{K)}	
			Jumlah akses, diseminasi dan utilitas informasi data spasial tematik SDA dan LH matra darat.	33 Prov, 6 K/L	33 Prov, 6 K/L	
E	Peningkatan Ketersediaan Data dan Informasi Survei Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Matra Laut.	Tersedianya data dan informasi spasial SDA dan LH tematik matra laut.	Jumlah dokumen rumusan kebijakan dan NSPK survei SDA dan LH tematik matra laut	1	5 ^{K)}	66,4
			Jumlah produk inventarisasi, neraca, kajian aplikasi tekno surta, remote sensing/GIS, dinamika geografis SDA dan kajian wilayah LH matra laut yang diatur dan dikelola sebagai basis data pemetaan nasional	18 NLP(@5 tema) dan 4 dok	90 NLP(@5 tema) dan 20 dok ^{K)}	
			Jumlah akses, diseminasi dan utilitas informasi data spasial tematik SDA dan LH matra laut	33 Prov, 6 K/L	33 Prov, 6 K/L	
F	Penyusunan Atlas Sumberdaya dan Kajian	Tersedianya data dan informasi atlas serta kajian pengembangan wilayah.	Jumlah dokumen rumusan kebijakan dan NSPK atlas serta kajian pengembangan wilayah.	0	4 ^{K)}	153,8

KEMENTERIAN/LEMBAGA : BAKOSURTANAL

NO	PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
	Pengembangan Wilayah.		Jumlah dokumen produk atlas sumberdaya beserta basisdatanya.	18	84 ^{K)}	
			Jumlah dokumen kajian model spasial dinamis serta difusi, diseminasi atlas dan kajian pengembangan wilayah.	2	6 ^{K)}	
			Jumlah daerah (propinsi dan kabupaten) untuk pelaksanaan akses, utilitas data dan informasi atlas sumberdaya dan kajian pengembangan wilayah.	14	70 ^{K)}	
G	Pembangunan Infrastruktur Data Spasial.	Rancangan rumusan kebijakan teknis, rencana dan program di bidang pembangunan Infrastruktur Data Spasial.	Jumlah simpul jaringan di pusat.	14	14 ^{K)}	948,2
			Jumlah simpul jaringan di provinsi	6	28 ^{K)}	
			Jumlah simpul jaringan di kabupaten/kota.	50	480 ^{K)}	
			Jumlah dokumen SNI	12	60 ^{K)}	
			Jumlah metadata simpul jaringan pusat.	3	13 ^{K)}	
			Jumlah metadata simpul jaringan provinsi.	3	15 ^{K)}	
			Jumlah metadata simpul jaringan kabupaten/kota	4	19 ^{K)}	
			Jumlah pembangunan dan pengembangan penghubung simpul.	1	5 ^{K)}	
			Jumlah dokumen pembangunan dan pengembangan IDSN.	1	5 ^{K)}	
			Jumlah tenaga terampil melalui Diklat Teknis Surta	70	430 ^{K)}	
			Jumlah tenaga terampil melalui Diklat Fungsional Surveyor Pemetaan	140	1.160 ^{K)}	
			Jumlah Dokumen NSPK tentang Pedoman, Standardisasi Kurikulum dan Silabus Diklat Surta	5	34 ^{K)}	
			Jumlah kegiatan peningkatan Kapabilitas Personil, Infrastruktur dan Administrasi Kediklatan	5	30 ^{K)}	
			Jumlah rasio jumlah penelitian per peneliti.	1:03	1:02	

KEMENTERIAN/LEMBAGA : BAKOSURTANAL

NO	PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
			Jumlah peraturan per-UU-an dan jumlah dokumen penyelenggaraan reformasi birokrasi.	1 UU	1 UU, 4 PP, 2 Perpres, 3 Kep KA-BAKOSURTANAL, 2 dokumen reformasi birokrasi ^{K)}	
			Jumlah dokumen penegakan Sertifikasi SDM surta non-PNS dan fungsionalisasi SDM surta PNS.	0	2 ^{K)}	
			Jumlah dokumen kegiatan promosi, humas, administrasi kerjasama dan publikasi surta.	4	20 ^{K)}	
H	Pembangunan Data Dan Informasi Geodesi Dan Geodinamika.	Rancangan rumusan kebijakan teknis, rencana dan program di bidang pembangunan data dan informasi geodesi dan geodinamika.	Jumlah jaring kontrol geodesi dan geodinamika yang dirawat	150	950 ^{K)}	84,9
			Jumlah stasiun tetap GPS dan perawatan sistem	78	458 ^{K)}	
			Jumlah Pembangunan stasiun tetap GPS	12	22 ^{K)}	
			Jumlah stasiun pasang surut laut yang dirawat	88	468 ^{K)}	
			Jumlah pembangunan stasiun pasang surut laut	7	7 ^{K)}	
			Jumlah stasiun permanen gayaberat yang dirawat	0	4 ^{K)}	
			Jumlah dokumen kebijakan teknis di bidang data dan informasi geodesi dan geodinamika.	1	5 ^{K)}	
			Jumlah basis data geodesi dan geodinamika.	1	5 ^{K)}	
2	Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BAKOSURTANAL					462,7
TOTAL ALOKASI BAKOSURTANAL 2010-2014						2.511,8

K : Angka kumulatif 5 tahun (2010-2014)

**RENCANA TINDAK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH 2010-2014
PER KEMENTERIAN/LEMBAGA**

KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR (BAPETEN)

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
1	PENGAWASAN PEMANFAATAN TENAGA NUKLIR					122,5
a	Pengkajian Pengawasan Instalasi dan Bahan Nuklir (IBN)	Tersedianya hasil kajian IBN	Dokumen kajian bidang IBN Terkait PLTN	8	8	7,6
b	Perumusan dan Pengembangan Peraturan Perundangan Instalasi dan Bahan Nuklir (IBN)	Tersedianya rancangan peraturan perundangan IBN	Dokumen Rancangan Peraturan bidang IBN Terkait PLTN	6	7	8,0
c	Pengembangan dan Pengelolaan Pelayanan Perizinan Instalasi dan Bahan Nuklir (IBN)	Terselenggaranya pelayanan perizinan IBN	Dokumen Perizinan Terkait PLTN	3	3	6,9
d	Penyelenggaraan dan Pengembangan Inspeksi Keselamatan, Keamanan dan Safeguards Instalasi dan Bahan Nuklir (IBN)	Terselenggaranya inspeksi keselamatan instalasi nuklir, safeguard dan proteksi fisik yang efektif dan efisien	Laporan Hasil Inspeksi	54	54	15,2
e	Penyelenggaraan dan Pengembangan Keteknikan, Sistem Manajemen dan Kesiapsiagaan Nuklir	Terselenggaranya pengembangan keteknikan, sistem manajemen dan kesiapsiagaan nuklir	Dokumen Pengembangan Keteknikan, Sistem Manajemen dan Kesiapsiagaan Nuklir	6	6	28,7
2	DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA					306,9
3	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR					19,6
TOTAL ALOKASI BADAN PENGAWASAN TENAGA NUKLIR (BAPETEN) 2010-2014						449,0

K : Angka kumulatif 5 tahun (2010-2014)

**RENCANA TINDAK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH 2010-2014
PER KEMENTERIAN/LEMBAGA**

KEMENTERIAN/LEMBAGA : LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA

NO	PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
1.	PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA LAN	Meningkatnya koordinasi perencanaan pembinaan, pengendalian terhadap program, administrasi dan sumber daya serta kerjasama dalam lingkup LAN	- Persentase terlaksananya program dan kegiatan yang direncanakan.	100%	100%	649,5
			- Jumlah laporan kegiatan yang sesuai dengan sistem aplikasi pelaporan	1 Lap	5 Lap ^{k)}	
			- Jumlah laporan keuangan yang sesuai dengan Sistem Akuntansi Publik (SAP).	1 Lap	5 Lap ^{k)}	
			- Jumlah peraturan perundang- undangan yang disusun.	1 paket	5 paket ^{k)}	
			- Persentase pelaksanaan kegiatan kerjasama luar negeri di bidang administrasi negara.	80%	80%	
			- Persentase ketersediaan arsip dalam memenuhi kebutuhan administrasi dan keuangan.	100%	100%	
			- Jumlah pegawai yang dikembangkan kapasitas dan kompetensinya.	100 orang	825 orang ^{k)}	
			- Jumlah publikasi hasil pelaksanaan tupoksi LAN.	1 paket	5 paket ^{k)}	
2.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR LAN	- Terlaksananya pembangunan, pengadaan dan peningkatan sarana dan prasarana di LAN	Persentase kelengkapan sarana dan prasarana layak pakai dan sesuai standar	70%	100%	207,7
		- Terlaksananya penyelesaian pembangunan gedung B Jakarta	Luas bangunan gedung B (10.000 m2/7 lantai)	30%	100%	

KEMENTERIAN/LEMBAGA : LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA

NO	PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITYAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
3.	PROGRAM PENGAJIAN ADMINISTRASI NEGARA DAN DIKLAT APARATUR NEGARA	- Meningkatnya kualitas pendidikan dan pelatihan sekolah pimpinan administrasi nasional secara optimal dan terukur.	- Persentase kelengkapan bahan pengembangan kurikulum dan bahan ajar pendidikan dan pelatihan kepemimpinan (diklatpim) dan program pengembangan eksekutif nasional.	90%	100%	151,6
			- Persentase kelengkapan dan bahan ajar pendidikan dan pelatihan SPIMNAS bidang teknik manajemen, fungsional dan kebijakan pembangunan.	100%	100%	
		- Meningkatnya kualitas perumusan, kualitas manajemen pelayanan publik, implementasi dan evaluasi serta monitoring kebijakan.	- Tingkat kepuasan pengguna terhadap hasil telaahan, penyusunan agenda dan sistem yang terkait dengan perumusan implementasi dan evaluasi serta monitoring kebijakan.	50%	70%	
			- Tingkat pemanfaatan hasil telaahan, penyusunan agenda dan pengembangan sistem yang terkait dengan perumusan, implementasi dan evaluasi serta monitoring kebijakan.	10%	25%	
			- Tingkat kepuasan pengguna terhadap hasil telaahan dan pengembangan sistem yang terkait dengan manajemen pelayanan publik.	60%	80%	
			- Tingkat pemanfaatan hasil telaahan dan pengembangan sistem yang terkait dengan manajemen pelayanan publik.	20%	30%	
			- Indeks data penyusunan telaahan kebijakan.	60%	80%	
		- Meningkatnya kualitas pelaksanaan kajian dan penelitian dan pengembangan dibidang pengembangan administrasi pembangunan negara, pengembangan sistem informasi administrasi negara dan pengembangan hukum administrasi negara.	- Indeks data pengembangan hukum administrasi negara	60%	80%	
			- Indeks data penyusunan agenda pengembangan administrasi negara.	40%	65%	
			- Indeks data pengembangan kerjasama dan administrasi pembangunan sosial ekonomi.	30%	50%	
			- Indeks data pengembangan sistem informasi dan otomasi administrasi negara.	30%	50%	

KEMENTERIAN/LEMBAGA : LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA

NO	PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
			- Indeks implementasi rekomendasi kajian di bidang administrasi pembangunan, hukum administrasi negara dan sistem informasi dan otomasi administrasi negara.	20%	40%	
		- Meningkatnya kualitas pembinaan diklat aparatur dan widyaiswara.	Standar kualitas diklat dan widyaiswara	70%	100%	
1.	Peningkatan kualitas pembinaan pendidikan dan pelatihan aparatur	Terbangunnya sistem diklat aparatur pola baru	- Jumlah juknis dan pedoman kediklatan	-	1 SK Kepala LAN ^{K)}	9,0
			- Jumlah modul diklat	1 modul	1 modul ^{K)}	
			- Laporan sosialisasi pembaharuan sistem diklat pola baru		2 laporan ^{K)}	
			- Laporan hasil revitalisasi SIDA	1 laporan	2 laporan ^{K)}	
			- Laporan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan diklat	1 laporan	2 laporan ^{K)}	
2.	Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknik manajemen dan kebijakan publik	Tersusunnya modul dan terselenggaranya diklat pelayanan publik	- Jumlah Peraturan Kepala LAN tentang Metode dan Modul Diklat Pelayanan Publik	-	1 ^{K)}	1,9
			- Jumlah peserta diklat TOT pelayanan publik berbasis kinerja	-	400 org ^{K)}	
3.	Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kepemimpinan tingkat I , II , III dan IV	Terselenggaranya diklat kepemimpinan tingkat I	Jumlah peserta diklat kepemimpinan tingkat I	60 org	300 org ^{K)}	11,7
4.	Pengkajian kinerja sumber daya aparatur	Tersusunnya kebijakan magang bagi calon pemimpin aparatur negara pada institusi bertaraf internasional	- Jumlah kebijakan tentang magang bagi calon pemimpin aparatur negara	-	1 kebijakan ^{K)}	1,2
			- Jumlah laporan review kebijakan magang	-	1 laporan ^{K)}	
5.	Pengkajian manajemen kebijakan	Tersusunnya kebijakan penyelenggaraan diklat bagi upaya penanganan dampak reformasi birokrasi instansi	Jumlah petunjuk teknis tentang penyelenggaraan diklat bagi upaya penanganan dampak reformasi birokrasi instansi	-	1 Kajian, 1 Perka LAN ^{K)}	1,8
TOTAL ALOKASI LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA 2010-2014						1.008,8

K : Angka kumulatif 5 tahun (2010-2014)

**RENCANA TINDAK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH 2010-2014
PER KEMENTERIAN/LEMBAGA**

KEMENTERIAN/LEMBAGA : ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

NO	PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITYAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
I	PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA ANRI	Meningkatnya efektifitas koordinasi perencanaan program dan kegiatan serta pengelolaan administrasi di lingkungan ANRI	1. Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan yang dapat diselesaikan tepat waktu	100%	100%	322,3
			2. Persentase berkurangnya revisi kegiatan yang diajukan unit kerja	20%	20%	
			3. Jumlah pengunjung ANRI	2.900 org	37.245 org	
			4. Persentase dokumen administrasi perkantoran yang dapat diselesaikan tepat waktu	90%	90%	
			5. Persentase layanan di bidang hukum dan kerjasama yang tepat sasaran	90%	90%	
			6. Persentase penyelesaian peraturan di bidang kearsipan	100%	100%	
			7. Persentase penyelesaian peraturan tentang tugas dan fungsi unit kerja	100%	100%	
			8. Persentase penyelesaian SOP unit kerja	100%	100%	
			9. Persentase penyelesaian administrasi kepegawaian terkait dengan kenaikan pangkat dan usulan pensiun pegawai	100%	100%	
			10. Persentase penempatan pegawai sesuai dengan kompetensi	100%	100%	
			11. Persentase peningkatan kualitas pengelolaan, penatausahaan anggaran/barang dan pertanggung jawaban serta pelaporannya	100%	100%	
			12. Persentase ketersediaan pedoman pengelolaan/data base arsip dinamis dan ketersediaan program/daftar arsip vital serta ketepatan waktu pendistribusian surat/barang cetakan	100%	100%	

KEMENTERIAN/LEMBAGA : ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

NO	PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
			13. Jumlah laporan hasil pengawasan dan rekomendasi pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di bidang kearsipan	6 Laporan	30 Laporan ^{K)}	
			14. Jumlah instansi/perusahaan yang memanfaatkan jasa kearsipan	8 Instansi	40 Instansi ^{K)}	
1.	Peningkatan layanan hukum, pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan, dan pengelolaan pegawai di lingkungan ANRI	Tersusunnya peraturan pelaksanaan dari UU No.43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	- Jumlah PP - Jumlah Inpres - Jumlah Perka. ANRI	- 4 PP tentang: · Sistem Kearsipan Nasional (SKN), · Sistem Informasi Kearsipan Nasional (SIKN), Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN); · Pengelola-an Arsip Dinamis; · Pengelola-an Arsip Statis; dan · Penyusu-tan Arsip - 1 Inpres, dan - 1 Perka ANRI	7 PP, ^{K)} 1 Inpres, 52 Perka ANRI	7,0
II	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR ANRI	Meningkatnya efektifitas pemenuhan sarana dan prasarana kantor untuk mendukung layanan arsip	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana kantor untuk mendukung layanan arsip	100%	100%	85,6

KEMENTERIAN/LEMBAGA : ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

NO	PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
III	PROGRAM PENYELENGGARA-AN KEARSIPAN NASIONAL	Meningkatnya kualitas pembinaan kearsipan secara efektif dan efisien	1. Persentase lembaga dan unit kearsipan yang sudah terakreditasi	5%	25%	207,3
			2. Persentase lembaga Negara dan badan pemerintah pusat yang memiliki pedoman kearsipan secara terpadu	5%	75%	
			3. Persentase lembaga Negara dan badan pemerintah pusat yang memiliki Jadwal Retensi Arsip (JRA)	5%	25%	
			4. Persentase hasil rekomendasi evaluasi yang digunakan sebagai input penyempurnaan sistem kearsipan bagi lembaga kearsipan daerah provinsi dan kabupaten/Kota	80%	80%	
			5. Jumlah pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan	2 angkatan diklat penciptaan Arsiparis	2 6 angkatan diklat penciptaan Arsipa-ris ^{K)}	
				-	1500 peserta diklat teknis ^{K)}	
750 peserta diklat teknis	2250 peserta diklat teknis ^{K)}					
1.	Pembinaan kearsipan pusat	Terlaksananya penerapan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (SIKD-TIK)	Jumlah instansi pusat dan Lembaga Kearsipan Pusat yang sudah menerapkan SIKD-TIK	10 instansi pusat	30 instansi pusat ^{K)}	11,4
TOTAL ALOKASI ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA 2010-2014						615,2

K : Angka kumulatif 5 tahun (2010-2014)

**RENCANA TINDAK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH 2010-2014
PER KEMENTERIAN/LEMBAGA**

KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NO	PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITYAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
I.	PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA BKN	- Meningkatnya efektifitas koordinasi perencanaan program dan kegiatan, sumber daya serta pengelolaan administrasi di lingkungan BKN	- Persentase money yang digunakan sebagai bahan perbaikan proses perencanaan pada periode selanjutnya	50%	80%	1.382,3
			- Persentase terlaksananya program dan kegiatan yang direncanakan	100%	100%	
			- Persentase penempatan pegawai yang sesuai dengan kompetensi	50%	80%	
			- Persentase laporan asset BKN yang dinilai wajar	60%	95%	
			- Opini BPK tentang laporan keuangan BKN	WDP	WTP	
			- Lamanya waktu merespon berita negatif	10 hari	1 hari	
			- Jumlah dokumentasi, informasi dan publikasi kegiatan BKN	40	95	
II.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR BKN	- Terlaksananya pembangunan, pengadaan dan peningkatan sarana dan prasarana di BKN	- Persentase gedung kantor yang dimiliki dengan gedung kantor yang dibutuhkan	100%	100%	413,0
			- Persentase gedung pusdiklat BKN yang dimiliki dengan gedung pusdiklat yang dibutuhkan	0%	100%	
			- Persentase gedung arsip yang dimiliki dengan gedung arsip yang dibutuhkan	63%	100%	
			- Persentase perbandingan rumah dinas yang dimiliki dengan kebutuhan	60%	100%	
			- Persentase sarana penunjang yang dimiliki dengan sarana penunjang yang dibutuhkan	70%	90%	

KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NO	PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITYAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
III.	PROGRAM PENYELENGGARAAN MANAJEMEN KEPEGAWAIAN NEGARA	- Terwujudnya rumusan kebijakan di bidang perencanaan dan pengembangan kepegawaian	- Presentase instansi pemerintah yang mengusulkan formasi PNS berdasarkan pedoman perencanaan kebutuhan pegawai	30%	100%	514,7
			- Presentase instansi pemerintah yang telah menerapkan standar kompetensi jabatan di lingkungannya	20%	100%	
			- Presentase hasil kajian/penelitian yang digunakan dalam penyusunan kebijakan nasional bidang kepegawaian	10%	40%	
			- Presentase lulusan diklat teknis manajemen PNS yang telah menempati posisi sesuai dengan bidangnya	40%	80%	
			- Presentase instansi pemerintah yang menerapkan penilaian kompetensi PNS dalam pengembangan karir kepegawaian di lingkungannya	20%	100%	
			- Presentase PNS memiliki kompetensi jabatan sesuai bidangnya	-	75%	
		- Terwujudnya rumusan kebijakan pembinaan kinerja dan pelaksanaan penyusunan peraturan perundang-undangan bidang kepegawaian	- Presentase produk peraturan perundang-undangan kepegawaian mengacu pada UU Nomor 43 Tahun 1999 dan peraturan pelaksanaannya	50%	90%	
			- Jumlah kebijakan kepegawaian baru yang ditetapkan	2 Naskah	7 Naskah ^{K)}	
			- Presentase instansi pemerintah yang telah menerapkan <i>reward & punishment</i> sesuai kinerjanya serta pola pengembangan karier yang jelas	50%	75%	
			- Presentase instansi pemerintah yang telah menerapkan <i>employee benefit</i> program	50%	75%	
			- Presentase PNS yang memiliki kompetensi jabatan sesuai dengan bidangnya	40%	100%	

KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NO	PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITYAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
		- Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan di bidang pengadaan, kepangkatan, dan mutasi lainnya, pelayanan pensiun PNS dan Pejabat Negara serta penetapan pertimbangan status dan kedudukan kepegawaian	- Persentase percepatan durasi penyelesaian penetapan SK, persetujuan, pertimbangan teknis kenaikan pangkat dan mutasi lainnya serta pensiun PNS dan pejabat negara	80%	90%	
			- Persentase percepatan durasi penyelesaian penetapan NIP, Karpeg dan Karis/Karsu	80%	90%	
			- Persentase percepatan durasi penyelesaian penetapan persetujuan / pertimbangan status dan kedudukan kepegawaian	80%	90%	
			- Persentase tindak lanjut evaluasi kinerja/pelayanan kepegawaian	80%	90%	
			- Lamanya waktu pelayanan kepegawaian yang telah disempurnakan	30 hari	20 hari	
		- Terwujudnya layanan kepegawaian dapat dilakukan dengan cepat, tepat dan mudah, berbasis teknologi informasi dan komunikasi dengan dukungan database PNS yang akurat yang dapat dipakai sebagai bahan penyusunan kebijakan di bidang kepegawaian	- Persentase instansi yang menerapkan sistem aplikasi kepegawaian secara online	10%	90%	
			- Persentase data PNS yang up to date dan akurat	30%	90%	
			- Jumlah jenis pelayanan kepegawaian yang dilaksanakan secara online sesuai standar pelayanan mutu	2 Paket	4 Paket	
			- Jumlah <i>stakeholder</i> menggunakan sistem KPE	31 Instansi	150 Instansi ^{K)}	
			- Persentase dokumen/arsip fisik yang mudah diakses secara cepat lengkap dan benar	20%	80%	
		- Meningkatnya efektifitas pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kepegawaian	- Persentase ketersediaan kebijakan-kebijakan pelaksanaan wasdal/bimtek di bidang kepegawaian	50%	90%	
			- Persentase penurunan pelanggaran norma, standar dan prosedur (sengketa bidang kepegawaian)	20%	60%	
			- Persentase lulusan Diklatfung yang diangkat dalam jabatan fungsional sesuai dengan kompetensi jabatan masing-masing	20%	80%	

KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NO	PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
			- Persentase jumlah PNS yang diangkat dalam jabatan struktural/fungsional sesuai dengan standar kompetensi jabatan yang diterapkan (<i>the right man on the right place</i>)	20%	80%	
1.	Pembangunan, pengembangan sistem informasi dan pengolahan data kepegawaian	- Terbangunnya sistem informasi kepegawaian yang terpadu	- Persentase berfungsinya sistem informasi kepegawaian nasional	25%	100%	174,9
			- Persentase SAPK online di semua instansi pusat dan daerah	25%	100%	
		- Terbangunnya database kepegawaian yang lengkap, akurat, dan terkini	- Persentase tingkat keakuratan data kepegawaian yang disajikan BKN	30%	100%	
2.	Perencanaan kepegawaian dan formasi	- Tersusunnya kebijakan realokasi/distribusi pegawai dan pelaksanaannya	- Jumlah petunjuk teknis penataan kepegawaian sebagai dampak pelaksanaan reformasi birokrasi	-	1 Perka BKN ^{K)}	4,8
			- Persentase jumlah pegawai yang telah tertangani statusnya sebagai dampak reformasi birokrasi	-	80%	
		- Tersusunnya kebijakan <i>right sizing</i> kepegawaian	- Jumlah kebijakan tentang <i>right sizing</i> kepegawaian	-	1 Perka BKN ^{K)}	
TOTAL ALOKASI BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA 2010-2014						2.310,1

K : Angka kumulatif 5 tahun (2010-2014)

**RENCANA TINDAK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH 2010-2014
PER KEMENTERIAN/LEMBAGA**

KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

NO	PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
1.	PROGRAM PENGAWASAN INTERN AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA DAN PEMBINAAN PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH	- Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pengawasan intern akuntabilitas keuangan negara dan pembinaan penyelenggaraan SPIP pada Kementerian/ Lembaga Bidang Perekonomian	- Persentase hasil pengawasan lintas sektor yang dijadikan bahan pengambilan keputusan oleh stakeholders	70%	90%	1.573,7
			- Persentase hasil pengawasan kebendaharaan umum negara yang dijadikan bahan pengambilan keputusan oleh Menteri Keuangan	50%	90%	
			- Persentase masukan yang dimanfaatkan Presiden	60%	60%	
			- Persentase Kementerian/Lembaga yang laporan keuangannya memperoleh opini minimal WDP	60%	95%	
			- Tingkat opini BPK terhadap LKPP	60%	80%	
			- Persentase peningkatan penerimaan negara dari hasil pengawasan	70%	85%	
			- Persentase hasil pengawasan atas permintaan stakeholders yang dijadikan bahan pengambilan keputusan oleh stakeholders	50%	90%	
- Persentase K/L dan Pemda yang menyelenggarakan SPIP sesuai PP Nomor 60 Tahun 2008	20%	70%				

KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

NO	PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
		- Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pengawasan intern akuntabilitas keuangan negara dan pembinaan penyelenggaraan SPIP pada Kementerian/ Lembaga Bidang Polsoskam	- Persentase hasil pengawasan lintas sektor yang dijadikan bahan pengambilan keputusan oleh stakeholders	50%	90%	
			- Persentase hasil pengawasan kebendaharaan umum negara yang dijadikan bahan pengambilan keputusan oleh Menteri Keuangan	50%	90%	
			- Persentase masukan yang dimanfaatkan Presiden	60%	60%	
			- Persentase Kementerian/Lembaga yang laporan keuangannya memperoleh opini minimal WDP	60%	95%	
			- Persentase peningkatan penerimaan negara dari hasil pengawasan	50%	90%	
			- Persentase hasil pengawasan atas permintaan stakeholders yang dijadikan bahan pengambilan keputusan oleh stakeholders	50%	90%	
		- Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pengawasan intern akuntabilitas keuangan negara dan pembinaan penyelenggaraan SPIP pada instansi Pemerintah Daerah	- Persentase hasil pengawasan lintas sektor yang dijadikan bahan pengambilan keputusan oleh stakeholders	50%	90%	
			- Persentase hasil pengawasan kebendaharaan umum negara yang dijadikan bahan pengambilan keputusan oleh Menteri Keuangan	50%	90%	
			- Persentase masukan yang dimanfaatkan Presiden	75%	75%	
			- Persentase Kementerian/Lembaga yang laporan keuangannya memperoleh opini minimal WDP	75%	95%	
			- Persentase hasil pengawasan atas permintaan stakeholders yang dijadikan bahan pengambilan keputusan oleh stakeholders	100%	100%	
			- Jumlah IPD yang melaksanakan pelayanan sesuai Standar Pelayanan Minimal/Pelayanan Prima	50	300	

KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

NO	PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
		- Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pengawasan intern akuntabilitas keuangan negara dan pembinaan penyelenggaraan SPIP pada Badan Usaha Milik Negara/Pemerintah Daerah	- Persentase BUMN/BUMD/BLU/BLUD yang GCG atau KPI mendapat skor baik	35%	75%	
			- BUMD yang kinerjanya memperoleh minimal predikat baik	30%	70%	
			- Persentase hasil pengawasan lintas sektor yang dijadikan bahan pengambilan keputusan oleh stakeholders	0%	75%	
			- Persentase hasil pengawasan kebendaharaan umum negara yang dijadikan bahan pengambilan keputusan oleh Menteri Keuangan	0%	75%	
			- Persentase BUMN yang kinerja PSO-nya baik	0%	80%	
			- Persentase BUMD yang laporan keuangannya memperoleh opini minimal WDP	40%	60%	
		- Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pengawasan intern akuntabilitas keuangan negara dan pembinaan penyelenggaraan SPIP terkait kegiatan investigasi	- Persentase masukan yang dimanfaatkan Presiden	75%	75%	
			- Persentase pemahaman dan kepedulian atas permasalahan korupsi	70%	80%	
			- IPP/IPD/BUMN/BUMD berisiko fraud yang mengimplementasikan FCP	10	60 ^{k)}	
			- IPP/IPD/BUMN/BUMD yang membuat/mengoreksi kebijakan	10	35 ^{k)}	
			- Persentase terselesaikannya kasus HKP, klaim, dan eskalasi	80%	84%	
			- Persentase penyerahan kasus kepada instansi penegak hukum	85%	85%	
			- Persentase hasil audit investigasi yang ditindaklanjuti oleh instansi berwenang	20%	50%	
			- Persentase telaahan terhadap laporan penugasan investigasi yang memenuhi standar	80%	90%	
			- Reviu terhadap laporan dan pengaduan masyarakat ditindaklanjuti	10%	10%	
			- Persentase masukan yang dimanfaatkan Presiden	70%	70%	

KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

NO	PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
1.	Pengendalian/pelaksanaan pengawasan intern akuntabilitas keuangan negara dan pembinaan penyelenggaraan SPIP Kementerian/Lembaga bidang fiskal dan investasi	- Terlaksananya Pembinaan Penyelenggaraan SPIP	- Jumlah Keputusan Kepala BPKP tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan SPIP	26	46 ^{K)}	61,6
			- Jumlah peserta diklat SPIP	1.650	5.700 ^{K)}	
			- Jumlah K/L dan Pemda yang mendapatkan sosialisasi SPIP	575	1035 ^{K)}	
			- Jumlah K/L dan Pemda yang mendapatkan konsultasi dan bimbingan teknis penyelenggaraan SPIP	116	655 ^{K)}	
2.	PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA BPKP	Meningkatnya kualitas dukungan manajemen dan kapasitas penyelenggaraan pengawasan intern akuntabilitas keuangan negara dan pembinaan penyelenggaraan SPIP	- Persentase jumlah rencana penugasan pengawasan yang terealisasi	70%	90%	2.298,3
			- Persentase jumlah pegawai BPKP yang kompeten dan profesional di setiap bidang kompetensi yang dibutuhkan	70%	90%	
			- Persepsi kepuasan terhadap pelayanan pengelola kepegawaian dan organisasi	7,2 skala likert	8 skala likert	
			- Persepsi kepuasan pengguna atas pencairan anggaran yang diajukan sesuai prosedur	7,5 skala likert	8,50 skala likert	
			- Tingkat opini BPK terhadap laporan keuangan BPKP	100%	100%	
			- Persepsi kepuasan pegawai/satuan kerja atas pembinaan dan bantuan hukum	7,5 skala likert	8,5 skala likert	
			- Persepsi publik yang positif terhadap BPKP	75%	83%	
			- Indeks efektivitas pengelolaan aset	100%	100%	
			- Persepsi kepuasan terhadap pelayanan pengelolaan sarpras	7,5 skala likert	8,3 skala likert	
			- Persentase tindak lanjut hasil pengawasan Inspektorat BPKP	70%	80%	

KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

NO	PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
			- Rasio SDM terdiklat sesuai kompetensi terhadap total jumlah yang dibutuhkan	82%	90%	
			- Persentase Pemanfaatan hasil Litbang	70%	80%	
			- Tingkat penerapan Jabatan Fungsional Auditor	60%	80%	
			- Pencapaian tatakelola APIP yang baik	20%	60%	
			- Tingkat persepsi kepuasan Instansi Pemerintah atas auditor bersertifikat	7 skala likert	8 skala likert	
			- Terimplementasinya sistem informasi untuk mendukung pengambilan keputusan internal (manajemen BPKP)	46%	70%	
			- Terimplementasinya Sistem Kendali Akuntabilitas Presiden (PASS)	49%	100%	
3.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR BPKP	Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana aparatur BPKP	Tingkat kepuasan penerimaan layanan (skala likert 1-10)	7,5	8,3	107,1
TOTAL ALOKASI BPKP 2010-2014						3.979,1

K : Angka kumulatif 5 tahun (2010-2014)

**RENCANA TINDAK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH 2010-2014
PER KEMENTERIAN/LEMBAGA**

KEMENTERIAN/LEMBAGA: KEMENTERIAN PERDAGANGAN

No	PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
1.	DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN PERDAGANGAN	Terwujudnya tatakelola yang baik dan kualitas layanan serta dukungan yang tinggi terhadap unit kerja dilingkungan Kementerian Perdagangan Tingkat kepercayaan stakeholders (internal maupun eksternal) yang tinggi.	1.Persentase penyelesaian SOP	100%	100%	2.364,0
			2.Tercapainya implementasi pengadaan barang-jasa secara elektronik	-	60%	
			3.Persentase penyelesaian Peraturan Menteri Perdagangan/ Keputusan Menteri Perdagangan	95%	95%	
			4.Persentase penyelesaian penataan/modernisasi organisasi dilingkungan Kementerian Perdagangan	100%	100%	
			5.Kualitas laporan keuangan Kementerian Perdagangan (opini) dari BPK	WDP	WTP	
a.	Pemberdayaan Dagang Kecil dan Menengah (Prioritas Bidang)	Meningkatnya, kreatifitas, kapasitas, dan kompetensi UMKM sektor perdagangan	1. Jumlah kebijakan dan pedoman untuk pengembangan usaha UKM mitra binaan (bahan)	4	24 ^{k)}	110,0
			2. Jumlah UKM mitra binaan yang diberikan bimbingan teknis, promosi/pemasaran, kemitraan usaha, sarana dagang/sarana usaha produktif, sertifikasi, fasilitasi, pendaftaran serta akses jaringan pembiayaan	1.000	1.200	
			3. Jumlah UKM yang tercantum pada database PDKM	200	1000 ^{k)}	
			4. Jumlah wirausaha baru dalam rangka pemberdayaan masyarakat madani melalui program Bantuan Sarana Usaha Mandiri (BSUM)-(UKM)	50	50	
			5. Jumlah kegiatan verifikasi dan evaluasi	6	6	

KEMENTERIAN/LEMBAGA: KEMENTERIAN PERDAGANGAN

No	PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
b.	Pengembangan Ekonomi Kreatif (Prioritas Bidang)	Meningkatnya kontribusi pelaku kreatif (UKM Kreatif dan Insan Kreatif) terhadap PDB	1. Persentase PDB ekonomi kreatif terhadap PDB Nasional	2%	4%	217,5
			2. Persentase UKM Kreatif yang mendapat transaksi bisnis di pameran DN dan LN	90%	90%	
			3. Jumlah pelaku ekonomi kreatif yang diberikan promosi/pemasaran, kemitraan, fasilitasi, penghargaan, dan akses pembiayaan	400	900	
			4. Persentase pelaku ekonomi kreatif di Indonesia yang tercantum dalam database online	20%	20%	
			5. Jumlah brand produk ekonomi kreatif yang dihasilkan	26	93	
c.	Pengembangan Standardisasi Bidang Perdagangan (Prioritas Bidang)	Terlaksananya standardisasi bidang perdagangan yang mengacu pada standar internasional	1. Jumlah rumusan standar barang dan jasa perdagangan	2	2	73,0
			2. Jumlah negosiasi pada sidang internasional yang terjadwal (sidang)	18	21	
			3. Jumlah penyusunan regulasi teknis standardisasi dalam bidang perdagangan	1	5 ^{K)}	
			4. Pembuatan buku standar contoh karet konvensional (sesuai amanat <i>International Rubber Asosiation</i> - IRA - setiap 2 tahun)	-	800	
			5. Penyelesaian pendaftaran Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) (hari)	5	3	
			6. Persentasi dukungan dan pemahaman publik terhadap Kebijakan Standardisasi Bidang Perdagangan (indeks persepsi stakeholder)	NA	80%	

KEMENTERIAN/LEMBAGA: KEMENTERIAN PERDAGANGAN

No	PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
2.	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APRATUR KEMENTERIAN PERDAGANGAN	Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana aparatur Kementerian Perdagangan	1.% Jumlah Unit Eselon I di lingkungan Kementerian Perdagangan yang menerima manfaat berupa fasilitas sarana dan prasarana kantor guna menunjang kegiatan kelancaran operasional perkantoran.	100%	100%	302,1
3.	PENGAWASAN DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS APARATUR KEMENTERIAN PERDAGANGAN	Terwujudnya pengawasan yang memberi nilai tambah terhadap peningkatan kinerja unit, akuntabilitas Laporan Keuangan dan tertib administrasi di lingkungan Kementerian Perdagangan.	1.Persentase penurunan jumlah temuan atas penyimpangan peraturan perundang-undangan. 2.Persentase jumlah pelaksanaan rekomendasi kebijakan 3.Peningkatan kualitas reviu Laporan Keuangan Kementerian 4.Peningkatan kualitas Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAK) Kementerian. 5.Jumlah unit yang memperoleh WTA (Wilayah Tertib Administrasi)	25% 25% 9 keg 60 keg 4 unit	75% 75% 9 keg 60 keg 28 unit	167,7
4.	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERDAGANGAN	Meningkatnya kualitas hasil penelitian dan pengembangan bidang perdagangan	1.Jumlah kegiatan kajian kebijakan dan pengembangan yang dihasilkan dalam bidang perdagangan. 2.Persentase hasil kajian kebijakan dan pengembangan dalam bidang perdagangan yang dijadikan sebagai bahan masukan perumusan kebijakan 3. Persentase hasil kajian kebijakan dan pengembangan perdagangan yang diterbitkan dalam publikasi ilmiah 4.Jumlah Rekomendasi Kebijakan yang dihasilkan 5.Jumlah sistem dan pelayanan data/informasi perdagangan yang akurat dan mudah diakses	12 20 80 2 6.600	15 30 95 3 7.800	317,2

KEMENTERIAN/LEMBAGA: KEMENTERIAN PERDAGANGAN

No	PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
5.	PENGEMBANGAN EKSPOR	Meningkatnya diversifikasi pasar ekspor	1. Menurunnya pangsa ekspor di pasar ekspor utama (%)	47	41	1.425,9
			2. Meningkatnya pangsa ekspor di pasar ekspor lainnya (%)	53	59	
			3. Meningkatnya pelayanan promosi dan hubungan dagang :			
			a. Jumlah kantor ITPC	20	30	
			b. Jumlah pameran internasional & misi dagang	57	113	
			c. Jumlah transaksi dagang (USD juta)	650	850	
			d. Jumlah Inquiry	1800	4260	
			4. Jumlah informasi pasar dan produk (ditinjau dari negara tujuan ekspor)	53	73	
			5. Jumlah informasi produk dan produsen produk ekspor (ditinjau dari komoditi ekspor)	27	47	
			6. Jumlah pelatihan bagi eksportir dan calon eksportir	120	140	
a.	Peningkatan kualitas promosi dan kelembagaan ekspor (Prioritas Bidang)	Meningkatnya peran lembaga promosi dan nilai tambah produk ekspor non migas	1. Jumlah pameran dagang dalam negeri	21	30	726,1
			2. Jumlah kerjasama dengan instansi terkait/asosiasi/dunia usaha	8	11	
			3. Jumlah penyelenggaraan kantor ITPC	20	30	
			4. Persentase penyerapan anggaran Dekon Pengembangan Ekspor Daerah	100	100	

KEMENTERIAN/LEMBAGA: KEMENTERIAN PERDAGANGAN

No	PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
b.	Pengembangan Pasar dan Produk Ekspor di Wilayah Afrika dan Timur Tengah (Prioritas Bidang)	Berkembangnya informasi pasar dan produk ekspor bagi dunia usaha, serta meningkatnya kerjasama dengan instansi terkait di wilayah Afrika dan Timur Tengah	1.Jumlah promosi dagang internasional yang diikuti	20	42	66,6
			2.Jumlah inquiry yang dihasilkan dari pameran dagang	600	1.350	
			3.Jumlah peserta yang mengikuti pameran dagang	160	275	
			4.Jumlah buku petunjuk pasar, profil produk, analisa pasar dan katalog produk yang disusun	27	48	
			5.Jumlah kerjasama dengan instansi terkait dalam pengembangan produk dan pasar di wilayah Afrika dan Timur Tengah	5	9	
c.	Pengembangan Pasar dan Produk Wilayah Asia, Australia, dan Selandia Baru (Prioritas Bidang)	Berkembangnya informasi pasar dan produk ekspor bagi dunia usaha, serta meningkatnya kerjasama	1. Jumlah promosi dagang internasional yang diikuti	18	35	95,4
			2. Jumlah <i>inquiry</i> yang dihasilkan dari pameran dagang	600	1.350	
			3. Jumlah peserta yang mengikuti pameran dagang	230	530	
			4. Jumlah buku petunjuk pasar, profil produk, analisa pasar dan katalog produk yang disusun	19	32	
			5. Jumlah kerjasama dengan instansi terkait dalam pengembangan produk dan pasar di wilayah Asia, Australia, dan Selandia Baru	7	15	
d.	Pengembangan SDM Bidang Ekspor (Prioritas Bidang)	Meningkatnya jumlah dan kualitas pelatihan eksportir dan calon eksportir	1.Jumlah pelatihan yang berorientasi ekspor	120	140	131,5
			2.Jumlah pelayanan prima terhadap peserta diklat	50	70	
			3.Jumlah pengembangan kurikulum dan metode diklat	9	10	
			4.Jumlah laporan monitoring dan evaluasi diklat ekspor	120	140	
			5.Jumlah kegiatan promosi kegiatan PPEI	25	50	
			6.Jumlah kerjasama diklat ekspor di dalam dan luar negeri	55	65	
			7.Jumlah peserta kegiatan temu alumni	100	100	
			8.Jumlah kegiatan partisipasi pameran bersama bagi alumni sebagai layanan program pascadiklat	4	12	

KEMENTERIAN/LEMBAGA: KEMENTERIAN PERDAGANGAN

No	PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
e.	Pengembangan Pasar dan Produk Wilayah Amerika dan Eropa (Prioritas Bidang)	Berkembangnya informasi pasar dan produk ekspor bagi dunia usaha, serta meningkatnya kerjasama dengan instansi terkait di wilayah Amerika dan Eropa	1. Jumlah promosi dagang internasional yang diikuti	19	36	107,2
			2. Jumlah <i>inquiry</i> yang dihasilkan dari pameran dagang	600	1.560	
			3. Jumlah peserta yang mengikuti pameran dagang	195	350	
			4. Jumlah buku petunjuk pasar, profil produk, analisa pasar dan katalog produk yang disusun	19	33	
			5. Jumlah kerjasama dengan instansi terkait dalam pengembangan produk dan pasar di wilayah Amerika dan Eropa	4	9	
6.	PROGRAM PENINGKATAN PERDAGANGAN LUAR NEGERI	Meningkatnya efektivitas pelaksanaan perdagangan luar negeri	1. Jumlah Rumusan kebijakan di bidang perdagangan luar negeri (peraturan)	24	25	1.044,7
			2. Waktu penyelesaian perijinan ekspor dan impor (hari)	4	1	
			3. Jumlah Pengawasan dan pengendalian mutu barang (komoditi)	3	10	
			4. Jumlah Pembinaan pelaku usaha dan pemangku kepentingan di bidang perdagangan luar negeri (kegiatan)	24	24	
			5. Persentase penyelesaian SOP pelayanan ekspor dan impor	100%	100%	
			6. Jumlah Perizinan ekspor dan impor yang dapat dilayani secara Online	40	93	
a.	Dukungan Sektor Perdagangan Terhadap Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (Prioritas Nasional)	Meningkatnya peranan sektor perdagangan di kawasan ekonomi khusus	1. Jumlah PP tentang Kawasan Ekonomi Khusus (peraturan)	1	2	10,9
			2. Jumlah kebijakan perdagangan yang dilimpahkan ke KEK (peraturan)	1	5	

KEMENTERIAN/LEMBAGA: KEMENTERIAN PERDAGANGAN

No	PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
b.	Pengelolaan Fasilitas Ekspor dan Impor (Prioritas Nasional)	Tersedianya kebijakan, Koordinasi, Bimbingan Teknis, Monitoring dan Evaluasi di bidang fasilitasi ekspor dan impor	1.Jumlah penerbitan kebijakan fasilitasi ekspor dan impor (Peraturan) 2.Jumlah pengembangan sistem elektronik bidang fasilitasi pelayanan publik (Kegiatan) 3.Jumlah pengguna perijinan ekspor/impor online melalui INATRADE (Perusahaan) 4.Jumlah bimbingan teknis bidang fasilitasi perdagangan (Kegiatan) 5.Jumlah koordinasi bidang fasilitasi perdagangan (Kegiatan) 6.Jumlah partisipasi sidang - sidang fasilitasi perdagangan didalam dan luar negeri (Kegiatan) 7.Jumlah laporan evaluasi pelaksanaan monitoring fasilitasi perdagangan (Bahan)	4 2 1.500 5 60 17 5	4 2 7.500 5 60 17 5	100,8
c.	Peningkatan Pengawasan dan Pengendalian Mutu Barang (Prioritas Bidang)	Tersedianya kebijakan dan bimbingan teknis pengawasan dan pengendalian mutu	PEDULI MUTU : 1.1 Jumlah bimbingan teknis, sosialisasi, monitoring untuk meningkatkan mutu produk ekspor (komoditi) 1.2 Jumlah bimtek, sosialisasi untuk meningkatkan kepedulian mutu produk impor (daerah) KENDALI MUTU: 2.1 Pengawasan mutu barang ekspor melalui preshipment inspection (komoditi) 2.2 Pengawasan mutu barang impor melalui pengawasan pra-pasar dengan mekanisme pendaftaran Nomor Pendaftaran Barang (NPB)	3 8 3 650	10 8 10 3400	111,6

KEMENTERIAN/LEMBAGA: KEMENTERIAN PERDAGANGAN

No	PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
			2.3 Pengawasan mutu barang produk dalam negeri setara dengan mutu produk impor melalui mekanisme pendaftaran Nomor Registrasi Produk (NRP)	100	500 ^{k)}	
			JEJARING KERJA MUTU 3.1 Road map kerjasama lembaga penilaian kesesuaian (LPK) baik dalam maupun luar negeri	1	5 ^{k)}	
			3.2 Jumlah kemampuan Lembaga Penilai Kesesuaian (LPK) yang dipantau	20	100	
			3.3 Jumlah pejabat fungsional Penguji Mutu Barang (PMB) (orang)	65	325	
			3.4 Jumlah Penetapan Angka Kredit (PAK) Penguji Mutu Barang (PMB) yang diterbitkan	95	495	
d.	Pengelolaan Impor (Prioritas Bidang)	Tersedianya kebijakan, standardisasi, dan bimbingan teknis serta evaluasi di bidang impor	1. Jumlah rumusan kebijakan/peraturan di bidang impor (peraturan)	5	5	48,0
			2. Jumlah data dan informasi importasi barang yang diatur tataniaga impornya (jenis)	3	15 ^{k)}	
			3. Jumlah penerbitan penetapan importir terdaftar(IT),	4.000	5.000	
			4. Jumlah penerbitan pengakuan sebagai Importir Produsen (IP)	2.000	2.800	
			5. Jumlah penerbitan surat persetujuan Impor (SPI)	3.000	4.000	
			6. Jumlah bimbingan teknis di bidang impor (kegiatan)	5	9	
			7. Jumlah laporan evaluasi pelaksanaan kebijakan impor (dokumen)	5	25 ^{k)}	

KEMENTERIAN/LEMBAGA: KEMENTERIAN PERDAGANGAN

No	PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
7.	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA PERDAGANGAN INTERNASIONAL	Meningkatnya kerja sama perdagangan internasional dalam rangka peningkatan dan pengamanan akses pasar	1.Pemenuhan <i>Asean Economic Community (AEC)</i> Blue Print berdasarkan Scorecard (%)	70	90	494,6
			2.Jumlah profil kasus tuduhan dumping, tuduhan subsidi, dan tindakan safeguard	19	20	
			3.Jumlah partisipasi dalam for a perundingan dan kerjasama perdagangan internasional	174	311	
			4.Jumlah hasil perundingan perdagangan internasional (Agreement, kesepakatan kerjasama komoditi, MRA, MoU, agreement, Agreed Minutes, Declaration, Chair Report)	140	192	
			5.Jumlah kesepakatan kerjasama perdagangan yang diratifikasi	7	1	
a.	Peningkatan Peran dan Kemampuan Diplomasi Perdagangan Internasional (Prioritas Nasional)	Meningkatnya peran dan kemampuan Indonesia dibidang diplomasi perdagangan internasional guna pembukaan, peningkatan, dan pengamanan akses pasar	1.Jumlah partisipasi dalam perundingan perdagangan internasional	40	55	179,9
			2.Jumlah posisi runding yang disusun	40	55	
			3.Jumlah penyelenggaraan sidang internasional di Dalam Negeri	8	8	
			4.Jumlah hasil perundingan Perdagangan Internasional (MRA, MoU, Agreement, Agreed Minutes, Declaration, Chair Report)	34	34	
			5.Jumlah forum konsultasi teknis kesepakatan perundingan internasional	6	8	
b.	Peningkatan Kerjasama dan Perundingan Bilateral di Kawasan Asia, Amerika dan Australia (Prioritas Bidang)	Meningkatnya hasil kerjasama dan perundingan perdagangan bilateral di kawasan Asia, Amerika dan Australia	1.Jumlah partisipasi dalam perundingan kerjasama bilateral di kawasan Asia, Amerika dan Australia	20	42	26,0
			2.Jumlah hasil perundingan kerjasama perdagangan bilateral di kawasan Asia, Amerika dan Australia	5	2	

KEMENTERIAN/LEMBAGA: KEMENTERIAN PERDAGANGAN

No	PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
			3.Jumlah kesepakatan kerjasama perdagangan bilateral di kawasan Asia, Amerika dan Australia yang diratifikasi	1	2 ^{K)}	
c.	Peningkatan Kerjasama dan Perundingan Bilateral di Kawasan Afrika, Eropa, dan Timur Tengah (Prioritas Bidang)	Meningkatnya hasil kerjasama dan perundingan perdagangan bilateral di Kawasan Afrika, Eropa, dan Tmur Tengah	1.Jumlah partisipasi dalam perundingan kerjasama bilateral di Kawasan Afrika, Eropa, dan Timur Tengah	12	12	26,0
			2.Jumlah hasil perundingan kerjasama perdagangan bilateral di Kawasan Afrika, Eropa, dan Timur Tengah	6	20 ^{K)}	
			3.Jumlah kesepakatan kerjasama perdagangan bilateral di Kawasan Afrika, Eropa, dan Tmur Tengah yang diratifikasi	0	1	
d.	Peningkatan Kerjasama di Bidang Perdagangan Jasa (Prioritas Bidang)	Meningkatnya Kerjasama di Bidang Perdagangan Jasa	1. Jumlah perundingan bidang jasa yang diikuti	10	30	20,4
			2. Jumlah hasil perundingan bidang jasa di forum internasional	3	2	
e.	Peningkatan Pengamanan dan Perlindungan Akses Pasar (Prioritas Bidang)	Meningkatnya hasil pengamanan dan perlindungan akses pasar	1.Jumlah submisi/sanggahan atas tuduhan dumping/tuduhan subsidi/tuduhan safeguard	28	30	34,3
			2.Jumlah abstraksi atas non confidential complaint tuduhan dumping, tuduhan subsidi, dan tindakan safeguard	19	20	
			3.Jumlah profil kasus tuduhan dumping, tuduhan subsidi dan tindakan safeguard	19	20	
8.	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI	Meningkatnya efektivitas kebijakan yang menunjang pengembangan dan pengamanan perdagangan dalam negeri	1.Persentase ketersediaan barang kebutuhan pokok bagi masyarakat	90%	98%	2.425,5
			2.Persentase rata-rata perbedaan tingkat harga Bahan Pokok antar provinsi di Indonesia	15%	9%	
			3.Jumlah Perizinan di bidang Perdagangan Dalam Negeri yang dilayani secara online	12	21	
			4.Waktu penyelesaian perizinan dan non perizinan dibidang perdagangan dalam negeri (hari)	6	2	
			5.Persentase masyarakat yang memahami perlindungan konsumen	2,5 %	12,5 %	

KEMENTERIAN/LEMBAGA: KEMENTERIAN PERDAGANGAN

No	PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
			6. Jenis barang beredar ber-SNI Wajib yang diawasi (notifikasi WTO)	14	46	
a.	Peningkatan Kelancaran Distribusi Bahan Pokok (Prioritas Nasional)	Terlaksananya kebijakan dan bimbingan teknis dalam rangka peningkatan kelancaran distribusi dan stabilisasi harga bahan pokok	1. Jumlah rumusan kebijakan dan standar, norma, kriteria dan prosedur di bidang pembinaan pasar dan distribusi (jenis)	6	25 ^{k)}	226,8
			2. Jumlah pelaku usaha yang mengikuti pembinaan, pelatihan dan bimbingan teknis (orang)	1.920	3.000	
			3. Persentase rata-rata perbedaan tingkat harga Bahan Pokok antar provinsi di Indonesia	15%	9%	
			4. Persentase ketersediaan barang kebutuhan pokok bagi masyarakat	90%	98%	
			5. Jumlah perizinan di bidang pembinaan pasar dan distribusi yang dilayani secara online	6	11	
			6. Waktu penyelesaian perizinan dan non perizinan di bidang pembinaan pasar dan distribusi (hari)	6	2	
b.	Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan (Prioritas Nasional)	Terbangunnya sarana distribusi dalam rangka kelancaran distribusi barang pokok	1. Jumlah pengembangan pasar percontohan (unit)	13	26	875,5
			2. Jumlah pembangunan pusat distribusi (unit)	-	4 ^{k)}	
			3. Jumlah rekomendasi penataan sistem distribusi (rekomendasi)	2	6	
c.	Pengembangan Kelembagaan dan Pelaku Usaha Perdagangan (Prioritas Bidang)	Terlaksananya kebijakan dan bimbingan teknis di bidang pembinaan kelembagaan dan pelaku usaha di bidang perdagangan dalam negeri	1. Jumlah rumusan kebijakan pembinaan usaha, lembaga perdagangan dan pendaftaran perusahaan yang disusun (kebijakan)	10	10	85,7
			2. Jumlah perizinan di bidang usaha perdagangan yang dilayani secara online	6	7	

KEMENTERIAN/LEMBAGA: KEMENTERIAN PERDAGANGAN

No	PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
			3. Waktu penyelesaian perizinan dan non perizinan di bidang usaha perdagangan(hari)	6	2	
			4.Jumlah data dan informasi perusahaan (perusahaan)	27.500	27.500	
			5.Jumlah pelaku usaha mengikuti pembinaan, pelatihan dan bimbingan teknis (orang)	150	300	
			6.Jumlah waralaba asing yang terdaftar (berdasarkan jumlah Surat Tanda Pendaftaran Waralaba-STPW yang dikeluarkan oleh kementerian perdagangan)	126	165	
			7.Jumlah waralabalokal/UKM yang terdaftar (berdasarkan jumlah Surat Tanda Pendaftaran Waralaba-STPW yang dikeluarkan oleh Disperindag Kabupaten/Kota)	51	89	
d.	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (Prioritas Bidang)	Meningkatnya penggunaan produk dalam negeri	Jumlah promosi produk dalam negeri (kegiatan)	4	6	221,8
e.	Pengembangan Kebijakan dan Pemberdayaan Perlindungan Konsumen (Prioritas Bidang)	Terlaksananya kebijakan pemberdayaan perlindungan konsumen	1.Jumlah rumusan kebijakan dan standar norma, kriteria dan prosedur di bidang perlindungan konsumen (rumusan)	5	20 ^{K)}	72,5
			2.Jumlah peserta pelatihan Perlindungan Konsumen yang mengikuti pelatihan (orang)	562	872	
			3.Jumlah Layanan Klinik Konsumen	48	96	
			4.Jumlah forum-forum koordinasi perlindungan konsumen	59	65	
			5.Jumlah sosialisasi Perlindungan Konsumen	43	60	
			6.Jumlah evaluasi dan pelaporan di bidang Perlindungan Konsumen (laporan)	32	34	
f.	Penguatan Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional (Prioritas Bidang)	Meningkatnya saran dan pertimbangan kepada Pemerintah terkait dengan upaya perlindungan konsumen di Indonesia	1.Jumlah rekomendasi kebijakan dan bahan pertimbangan kepada Pemerintah	6	42 ^{K)}	84,0

KEMENTERIAN/LEMBAGA: KEMENTERIAN PERDAGANGAN

No	PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
			2. Persentase masyarakat yang memahami perlindungan konsumen	2,50%	12,50%	
			3. Prosentase kajian dan telaahan yang dipublikasikan	-	60%	
			4. Prosentase isu/pengaduan yang ditangani	70%	80%	
			5. Jumlah supervisi kepada LPKSM dalam aspek pengawasan barang dan advokasi konsumen	-	20 kl	
			6. Jumlah jenis dan pemutakhiran database perlindungan konsumen	-	40	
			7. Jumlah kegiatan fasilitasi, pelatihan dan edukasi serta penyebaran informasi perlindungan konsumen	9	21	
g.	Peningkatan Tertib Ukur (Prioritas Bidang)	Meningkatnya pelayanan dan pengawasan di bidang metrologi legal	1. Jumlah rumusan kebijakan metrologi legal yang disusun (kebijakan)	8	40 ^{k)}	350,6
			2. Jumlah UTTP yang memerlukan penanganan khusus yang dapat ditangani untuk ditera dan tera ulang (unit)	8.100	8.100	
			3. Jumlah SDM metrologi legal yang melaksanakan kegiatan metrologi legal seperti tenaga pengamat tera, tenaga penera, tenaga pranata laboratorium, tenaga penguji, PPNS, dan tenaga penyuluh. (orang)	705	1.000	
			4. Jumlah Unit Pelaksana Teknis Daerah yang dinilai dan dibina	20	20	
			5. Jumlah standar milik Unit Pelaksana Teknis dan Unit Pelaksana Teknis Daerah yang telah ditelusur secara nasional	20	20	
			6. Pengadaan Standar dan Peralatan standar BSML di Medan, Makassar, Yogyakarta, dan Banjarmasin (unit)	10	50 ^{k)}	
			7. Jumlah perizinan di bidang kemetrologian yang dilayani secara online	-	3	

KEMENTERIAN/LEMBAGA: KEMENTERIAN PERDAGANGAN

No	PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
			8. Waktu penyelesaian perizinan dan non perizinan di bidang kemetrolagian (hari)	-	2	
h.	Peningkatan Efektifitas Pengawasan Barang Beredar dan Jasa (Prioritas Bidang)	Meningkatnya efektivitas pengawasan barang dan jasa	1.Jumlah rumusan kebijakan, standar, norma dan pedoman pengawasan barang dan jasa (kebijakan)	11	55 ^{k)}	117,0
			2.Jumlah kegiatan pengawasan barang dan jasa	7	7	
			3. Jenis barang beredar ber-SNI wajib yang diawasi (notifikasi WTO)	14	46	
			4.Jumlah kegiatan sosialisasi, serta publikasi peraturan dan hasil pengawasan	5	5	
			5.Jumlah diklat dan bimbingan teknis PPNS-PK dan PPBJ (orang)	180	300	
9.	PROGRAM PENINGKATAN EFISIENSI PASAR KOMODITI	Meningkatnya pembinaan, pengaturan dan pengawasan bidang perdagangan berjangka komoditi, sistem resi gudang dan pasar lelang	1.Jumlah kebijakan teknis dalam bentuk peraturan-peraturan di bidang perdagangan berjangka komoditi, sistem resi gudang dan pasar lelang yang dihasilkan (peraturan)	15	15	409,2
			2.Jumlah hari penyelesaian perizinan pelaku usaha Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK) dan Sistem Resi Gudang (SRG) dan Pasar Lelang (PL) setelah dokumen lengkap	32	20	
			3.Persentase penyelesaian kasus di bidang PBK, SRG dan PL	90%	90%	
			4.Jumlah hari pemrosesan persetujuan kontrak komoditi yang diajukan oleh bursa	32	20	
			5.Jumlah jenis publikasi dan informasi di bidang PBK, SRG dan PL	8	8	
			6.Jumlah pelaksanaan sosialisasi dan edukasi di bidang PBK, SRG dan PL	12	14	

KEMENTERIAN/LEMBAGA: KEMENTERIAN PERDAGANGAN

No	PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
a.	Pembinaan dan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi (Prioritas Bidang)	Meningkatnya hasil pembinaan dan pengawasan terhadap pelaku usaha dibidang perdagangan berjangka komoditi	1.Persentase kepatuhan penyampaian laporan kegiatan pelaku usaha PBK	85%	95%	37,5
			2.Jumlah hari penyelesaian perizinan pelaku usaha PBK setelah dokumen lengkap	32	20	
			3.Jumlah Peserta Pelatihan Teknis Pelaku Usaha PBK (orang)	120	250	
			4.Persentase kepatuhan pelaksanaan transaksi	85%	95%	
			5.Jumlah pelaku usaha PBK yang diaudit (perusahaan)	12	20	
b.	Pembinaan dan Pengawasan Pasar Lelang (PL) dan Sistem Resi Gudang (SRG)- (Prioritas Bidang)	Meningkatnya hasil pembinaan dan pengawasan pasar lelang dan sistem resi gudang	1.Jumlah pengelola SRG	45	95	100,7
			2.Persentase penanganan masalah PL dan SRG	90%	90%	
			3.Jumlah peserta pelatihan teknis penyelenggara PL dan SRG (orang)	150	150	
			4.Jumlah pemantauan dan evaluasi PL dan SRG(kali)	65	100	
			5.Jumlah hari penyelesaian perizinan pelaku usaha SRG setelah dokumen lengkap	32	20	
TOTAL ALOKASI KEMENTERIAN PERDAGANGAN 2010-2014						8.950,8

K : Angka kumulatif 5 tahun (2010-2014)

**RENCANA TINDAK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH 2010-2014
PER KEMENTERIAN/LEMBAGA**

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT

No.	PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil Outcomes/ Output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
I	PROGRAM DUKUNGAN DAN MANAJEMEN TUGAS TEKNIS LAINNYA					1.171,4
II	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN					12.111,1
1	Pembangunan rumah susun sederhana sewa	380 twin block	Jumlah rusunawa terbangun	100	380 ^{K)}	4.560,0
2	Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan swadaya	50.000 unit	Jumlah fasilitasi dan stimulasi pembangunan baru perumahan swadaya	7.500	50.000 ^{K)}	536,3
3	Fasilitasi dan stimulasi peningkatan kualitas perumahan swadaya	50.000 unit	Jumlah fasilitasi dan stimulasi peningkatan kualitas perumahan swadaya	7.500	50.000 ^{K)}	286,3
4	Fasilitasi pembangunan PSU kawasan perumahan dan permukiman	700.000 unit	Jumlah fasilitasi dan stimulasi prasarana, sarana dan utilitas perumahan swadaya	90.374	700.000 ^{K)}	4.375,0
5	Fasilitasi pembangunan PSU perumahan swadaya	50.000 unit	Jumlah fasilitasi dan stimulasi prasarana, sarana dan utilitas perumahan swadaya	7.500	50.000 ^{K)}	236,3
6	Fasilitasi dan Stimulasi Penataan Lingkungan Permukiman Kumuh	655 Ha	Jumlah permukiman kumuh yang terfasilitasi	50	655 ^{K)}	1.043,0
7	Fasilitasi pra-sertifikasi dan pendampingan pasca-sertifikasi	30.000 unit	Jumlah unit lahan dan bangunan rumah yang terfasilitasi pra-sertifikasi dan pendampingan pasca sertifikasi	-	30.000 ^{K)}	12,0
8	Fasilitasi pembangunan rumah khusus	5.000 unit	Jumlah rumah khusus terbangun	250	5.000 ^{K)}	259,7
9	Pengembangan Kebijakan dan Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Perumahan dan Permukiman	20 peraturan perundangan	Jumlah revisi peraturan perundangan	4	20 ^{K)}	802,6
III	PROGRAM PENGEMBANGAN PEMBIAYAAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN					412,0

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT

No.	PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil Outcomes/ Output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
1	Pengembangan Kebijakan dan Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Pembiayaan Perumahan dan Permukiman	10 peraturan perundangan	Jumlah revisi peraturan perundangan	2	10 ^{K)}	412,0
TOTAL ALOKASI KEMENPERA 2010-2014						13.694,5

K : Angka kumulatif 5 tahun (2010-2014)

**RENCANA TINDAK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH 2010-2014
PER KEMENTERIAN/LEMBAGA**

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

NO	PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
1	DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengawasan, administrasi keuangan dan kepegawaian, serta pelayanan umum di Kementerian Pemuda dan Olahraga.	1. Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, kepegawaian, ketatalaksanaan, pengawasan internal, yang dihasilkan secara akurat dan tepat waktu. 2. Jumlah layanan kemasyarakatan, media massa, kelembagaan, pimpinan, operasional, administrasi, dan perpustakaan, serta layanan hukum yang terintegrasi, transparan, dan akuntabel.	35 4	175 ^{K)} 32 ^{K)}	2.260,6
2	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA	Meningkatnya kualitas pengelolaan sarana dan prasarana aparatur.	Persentase operasional dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur.	100	100	1.241,3
3	Program Pelayanan Kepemudaan	Meningkatnya partisipasi dan peran aktif pemuda di berbagai bidang pembangunan	1. Jumlah pengelola organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pelatihan kepemimpinan, manajemen, dan perencanaan program. 2. Jumlah pemuda kader yang difasilitasi dalam peningkatan wawasan serta kapasitas di bidang seni budaya, iptek, dan imtaq. 3. Jumlah pemuda kader kepemimpinan. 4. Jumlah pemuda kader kewirausahaan. 5. Jumlah pembina pramuka, penegak, dan pandega yang mendapat fasilitasi pelayanan kepemudaan.	6.000 8.680 4.500 3.175 2.600	40.000 ^{K)} 48.400 ^{K)} 38.500 ^{K)} 16.575 ^{K)} 19.000 ^{K)}	896,4
3.1	Pengembangan Kerjasama dan Kemitraan Kepemudaan	Meningkatnya kemitraan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pelayanan kepemudaan	1. Jumlah koordinasi dan kemitraan kepemudaan lintas sektor tingkat pusat. 2. Jumlah koordinasi dan kemitraan kepemudaan antar tingkat pemerintahan.	25 6	25 33 ^{K)}	34,2

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

NO	PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
3.2	Peningkatan Wawasan Pemuda	Meningkatnya wawasan pemuda kader di bidang kebangsaan, perdamaian, dan lingkungan hidup	1. Jumlah pemuda yang difasilitasi dalam peningkatan wawasan kebangsaan, perdamaian, dan lingkungan hidup.	5.500	32.500 ^{K)}	40,4
3.3	Peningkatan Kapasitas Pemuda	Meningkatnya kapasitas pemuda kader di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, serta iman dan taqwa	1. Jumlah pemuda kader yang difasilitasi dalam peningkatan kapasitas di bidang iptek dan imtaq.	3.180	15.900 ^{K)}	41,5
3.4	Peningkatan Potensi Sumber Daya Pemuda	Meningkatnya inventarisasi potensi sumber daya kepemudaan	1. Jumlah fasilitasi inventarisasi potensi sumber daya kepemudaan, 2. Jumlah naskah analisa potensi sumberdaya kepemudaan,	66 7	330 ^{K)} 35 ^{K)}	34,0
3.5	Pemberdayaan Organisasi Kepemudaan	Meningkatnya kapasitas pengelolaan organisasi kepemudaan	1. Jumlah pengelola organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pelatihan kepemimpinan, manajemen, dan perencanaan program, 2. Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam memenuhi kualifikasi berdasarkan standar organisasi kepemudaan,	6.000 98	40.000 ^{K)} 140	30,4
3.6	Pengembangan Kepanduan	Terlaksananya pendidikan, pengembangan, dan pemasyarakatan kepanduan	1. Jumlah pemuda yang difasilitasi dalam pendidikan kepemudaan, 2. Jumlah pemuda yang difasilitasi dalam pendidikan kepanduan	250 3.100	2.200 ^{K)} 24.000 ^{K)}	412,0
3.7	Pengembangan Kepemimpinan Pemuda	Meningkatnya kapasitas dan potensi kepemimpinan pemuda	1. Jumlah pemuda kader kepemimpinan,	4.500	38.500 ^{K)}	44,4
3.8	Pengembangan Kepedulian Pemuda	Meningkatnya kepedulian dan kepekaan sosial pemuda terhadap masyarakat dan lingkungan hidup	1. Jumlah sarjana kader pembangunan perdesaan; 2. Jumlah pemuda kader kesukarelawanan di daerah tertinggal, daerah bencana, dan daerah konflik;	3.000 299	3.000 2.649 ^{K)}	39,5
3.9	Pengembangan Kewirausahaan Pemuda	Meningkatnya kapasitas dan potensi kewirausahaan pemuda	1. Jumlah pemuda yang difasilitasi sebagai kader kewirausahaan, 2. Jumlah fasilitasi sentra-sentra kewirausahaan pemuda,	3.175 66	16.575 ^{K)} 66	46,0

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

NO	PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
3.10	Pengembangan Kreativitas dan Kualitas Pemuda	Meningkatnya kreativitas pemuda kader di bidang seni, budaya, dan industri kreatif.	1. Jumlah pemuda kader yang difasilitasi dalam peningkatan kapasitas di bidang seni, budaya, dan industri kreatif.	3.180	15.900 ^{K)}	34,4
3.11	Pengembangan Kepeloporan Pemuda	Meningkatnya kapasitas dan potensi kepeloporan pemuda	1. Jumlah pemuda kader pelopor,	1.000	10.000 ^{K)}	68,4
3.12	Peningkatan Prasarana dan Sarana Kepemudaan	Meningkatnya pemanfaatan dan penyediaan prasarana dan sarana kepemudaan	1. Jumlah fasilitasi penyediaan prasarana dan sarana kepemudaan,	300	1.750 ^{K)}	43,4
			2. Jumlah fasilitasi sentra pemberdayaan pemuda,	33	33	
3.13	Peningkatan Pelayanan Sentra Pemberdayaan Pemuda	Meningkatnya pelayanan pendidikan dan pelatihan di bidang kepemudaan (PP-PON).	Jumlah fasilitasi pelayanan pendidikan dan pelatihan.	33	33	27,9
4	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan olahraga	1. Jumlah pelatih olahraga pendidikan yang memiliki kompetensi di satuan-satuan pendidikan, 2. Jumlah peserta perlombaan/ festival/invitasi/kompetisi olahraga rekreasi, 3. Jumlah peserta pendidikan sekolah olahraga.	240 7.000 200	1.240 ^{K)} 95.000 ^{K)} 200	962,6
4.1	Pengembangan Olahraga Pendidikan	Meningkatnya kapasitas pelatih olahraga, sarana olahraga dan penyelenggaraan kompetisi olahraga pendidikan	1. Jumlah pelatih olahraga pendidikan yang memiliki kompetensi di satuan-satuan pendidikan, 2. Jumlah fasilitasi kejuaraan olahraga pendidikan, 3. Jumlah fasilitasi sarana olahraga pendidikan, 4. Jumlah peserta pendidikan sekolah olahraga,	240 7 66 200	1.240 ^{K)} 35 ^{K)} 330 ^{K)} 200	147,4
4.2	Pengembangan Olahraga Rekreasi	Meningkatnya fasilitasi penyelenggaraan kejuaraan olahraga rekreasi.	1. Jumlah peserta perlombaan olahraga massal, 2. Jumlah peserta festival dan invitasi olahraga tradisional, 3. Jumlah fasilitasi kompetisi olahraga rekreasi.	7.000 660 20	45.000 ^{K)} 4.410 ^{K)} 152 ^{K)}	56,1
4.3	Peningkatan Prasarana dan Sarana Keolahragaan	Meningkatnya penyediaan prasarana dan sarana keolahragaan yang memenuhi standar kelayakan	1. Jumlah naskah kebijakan penetapan prasarana olahraga nasional, 2. Jumlah fasilitasi penyediaan prasarana olahraga, 3. Jumlah penyediaan sarana olahraga.	1 4 44	9 ^{K)} 24 ^{K)} 274 ^{K)}	451,1

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

NO	PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
4.4	Pengembangan Standardisasi Keolahragaan	Tersedianya standar nasional keolahragaan.	1. Jumlah naskah standar nasional keolahragaan, 2. Jumlah pedoman pelaksanaan akreditasi keolahragaan, 3. Jumlah pedoman pelaksanaan sertifikasi keolahragaan.	21 20 16	109 ^{K)} 94 ^{K)} 87 ^{K)}	94,4
4.5	Pengembangan Promosi, dan Penghargaan Keolahragaan	Meningkatnya promosi, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pengelolaan, serta penghargaan keolahragaan	1. Jumlah penerima penghargaan keolahragaan, 2. Jumlah koordinasi dan kemitraan keolahragaan lintas sektor tingkat pusat, 3. Jumlah koordinasi dan kemitraan keolahragaan antar tingkat pemerintahan dalam rangka sosialisasi dan promosi.	350 16 33	2.250 ^{K)} 16 165 ^{K)}	107,6
4.6	Peningkatan Pelayanan Iptek, Kesehatan, dan Informasi Olahraga	Meningkatnya pelayanan, pengujian, dan pemeriksaan kesehatan olahragawan	1. Persentase kepuasan pelanggan, 2. Jumlah fasilitas pelayanan, pengujian dan pemeriksaan kesehatan olahragawan di daerah.	75 33	95 33	17,7
4.7	Pengembangan Sentra Keolahragaan	Meningkatnya kapasitas pelaku industry olahraga	1. Jumlah PPLP dan PPLM yang difasilitasi, 2. Jumlah pelaku industri olahraga yang memperoleh fasilitas peningkatan kapasitas manajemen, 3. Jumlah fasilitas penyelenggaraan seni pertunjukkan olahraga.	54 60 7	54 480 ^{K)} 35 ^{K)}	38,4
4.8	Pengembangan Olahraga Khusus	Meningkatnya kapasitas pelatih/instruktur/pembina olahraga khusus dan penyelenggaraan kompetisi	1. Jumlah pelatih/instruktur/pembina olahraga khusus. 2. Jumlah fasilitas kejuaraan olahraga khusus.	100 10	500 ^{K)} 50 ^{K)}	50,0
5	Pembinaan Olahraga Prestasi	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan olahraga dan prestasi olahraga di tingkat regional dan internasional	1. Jumlah organisasi keolahragaan yang memenuhi standar kelayakan, 2. Jumlah tenaga keolahragaan pada cabang olahraga unggulan yang memperoleh fasilitas peningkatan kompetensi, 3. Jumlah fasilitas kejuaraan cabang olahraga unggulan bertaraf internasional.	9 388 125	49 ^{K)} 1.988 ^{K)} 665 ^{K)}	2.336,6
5.1	Pengembangan Produk Industri Olahraga	Meningkatnya fasilitas pengembangan produk industri olahraga	1. Jumlah pelaku industri olahraga yang memperoleh fasilitas peningkatan kapasitas teknik produksi,	458	2.058 ^{K)}	36,4

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

NO	PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
			2. Jumlah fasilitasi penyelenggaraan kejuaraan olahraga dirgantara, bahari, dan lintas alam.	3	15 ^{K)}	
5.2	Pembinaan Olahraga Prestasi	Meningkatnya pembinaan olahraga prestasi	1. Jumlah olahragawan andalan nasional, 2. Jumlah fasilitasi pembinaan cabang olahraga unggulan nasional, 3. Jumlah fasilitasi kejuaraan cabang olahraga unggulan bertaraf internasional, 4. Jumlah fasilitasi penyelenggaraan SEA Games dan Para Games pada tahun 2011 5. Jumlah fasilitasi keikutsertaan pada Asian Games, SEA Games, Olympic Games, Asian Para Games, Para Games, dan Paralympic Games	520 25 125 - 2	520 27 135 2 ^{K)} 10 ^{K)}	1.993,1
5.3	Pengembangan Iptek Olahraga	Meningkatnya penerapan iptek olahraga dalam upaya peningkatan prestasi	1. Jumlah riset penerapan teknologi olahraga modern pada metode pembinaan olahragawan, 2. Persentase pemanfaatan iptek olahraga modern pada metode pembinaan olahragawan andalan nasional.	7 75	47 ^{K)} 95	71,9
5.4	Pemberdayaan Organisasi Keolahragaan	Meningkatnya kapasitas pengelolaan organisasi keolahragaan	1. Jumlah pembina induk organisasi cabang olahraga yang dilatih manajemen, dan perencanaan program pelatihan, 2. Jumlah fasilitasi pembinaan induk organisasi cabang olahraga.	66 10	466 ^{K)} 10	59,0
5.5	Pengembangan dan Pembibitan Olahraga Prestasi	Meningkatnya pembibitan olahragawan dan pengembangan olahraga	1. Jumlah peserta pemaudan bakat cabang olahraga unggulan, 2. Jumlah fasilitasi keikutsertaan cabang olahraga unggulan pada kejuaraan bertaraf internasional, 3. Jumlah fasilitasi pemusatan latihan cabang olahraga unggulan, 4. Jumlah fasilitasi penyelenggaraan kejuaraan junior cabang olahraga unggulan bertaraf internasional.	400 12 11 1	400 60 ^{K)} 11 5 ^{K)}	104,7

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

NO	PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
5.6	Pengembangan Tenaga Keolahragaan	Meningkatnya kapasitas tenaga keolahragaan dan kualitas pembinaan	Jumlah tenaga keolahragaan pada cabang olahraga unggulan yang memperoleh fasilitasi peningkatan kompetensi	388	1.988 ^{K)}	71,5
TOTAL ALOKASI KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 2010-2014						7.697,5

K : Angka kumulatif 5 tahun (2010-2014)

**RENCANA TINDAK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH 2010-2014
PER KEMENTERIAN/LEMBAGA**

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

NO	PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
1	Program Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	Efektivitas Penindakan TPK	Putusan <i>Inkracht</i> Pengadilan Tipikor yang Menyatakan Terdakwa Bersalah (Persentase)	80%	90%	949,3
		Penindakan TPK yang Kuat dan Proaktif	Hasil Pengembalian/ Penyelamatan Kerugian Negara dari Eksekusi Perkara yang Telah <i>Inkracht</i> (Persentase)	50%	50%	
		Efektivitas Koordinasi dan Supervisi bidang Penindakan	Keberhasilan Penanganan Perkara TPK oleh Appakum yang Disupervisi KPK (Persentase)	100%	100%	
		Berkurangnya Korupsi di Indonesia	Indeks Integritas Nasional (Indeks)	6,7	7,8	
		Pencegahan TPK yang Komprehensif	Penyelamatan Aset/Kekayaan Negara dari Pencegahan (Miliar Rupiah)	500	2500 ^(K)	
		Monitoring Penyelenggaraan Pemerintahan Negara	Rekomendasi yang Diimplementasikan oleh Instansi/Lembaga Terkait (Persentase)	30%	30%	
		Organisasi yang Bebas dari Korupsi dan Mafia Hukum	Kasus korupsi dan mafia hukum yang melibatkan personil KPK (Jumlah)	0	0	
	Efektivitas Penanganan Pengaduan Masyarakat	Hasil Pemeriksaan Dumas yang Dilimpahkan ke Bidang Penindakan (Jumlah)	56	392 ^(K)		
1.1	Penyelidikan Tindak Pidana Korupsi	Penyelidikan	Kasus Potensial (Kasus)	60	350 ^(K)	45,2
			Kasus Solid (Kasus)	28	185 ^(K)	
1.2	Penyidikan Tindak Pidana Korupsi	Penyidikan	Penyidikan (Perkara)	55	325 ^(K)	44,9
			Penyidikan Lengkap (Perkara)	38	212 ^(K)	

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

NO	PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
1.3	Penuntutan dan Eksekusi Tindak Pidana Korupsi	Penuntutan	Berkas Perkara yang dilimpahkan ke Pengadilan Negari (Perkara)	38	212 ^{K)}	50,5
		Eksekusi	Pelaksanaan Pidana Badan (Persen)	100%	100%	
1.4	Koordinasi dan Supervisi Penindakan TPK	Korsup Penindakan	Peningkatan Perkara yang Disupervisi KPK (Persen)	100%	100%	22,5
			Peningkatan Jumlah Penerimaan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (Persen)	100%	100%	
1.5	Pengelolaan LHKPN	Penanganan LHKPN	LHKPN yang Diumumkan dalam TBN (Jumlah Penyelenggara Negara)	21.000	89.000 ^{K)}	45,8
			Klarifikasi kepada Penyelenggara Negara	330	2.160 ^{K)}	
			Kasus Diserahkan kepada Dit.Lidik (Jumlah)	3	21 ^{K)}	
1.6	Pengelolaan Gratifikasi	Penanganan Gratifikasi	Jumlah SK Penetapan Status Gratifikasi	300	1.800 ^{K)}	15,4
			Kasus Dserahkan kepada Dit.Lidik (Jumlah)	6	42 ^{K)}	
			Jumlah Instansi/Lembaga (Pemerintah, BUMN dan Swasta) yang melaksanakan Program Pengendalian Anti Gratifikasi	2	30 ^{K)}	
1.7	Penyelenggaraan Pendidikan, Sosialisasi, dan Kampanye Anti Korupsi	Pendidikan, Sosialisasi, dan Kampanye	Jumlah Sekolah/Lembaga pendidikan yang menerapkan Modul Anti Korupsi	60	460 ^{K)}	57,8
			Peningkatan Komunitas Anti Korupsi	15	100 ^{K)}	
			Instansi/Lembaga (Pemerintah, Swasta, Masyarakat) yang Melaks. Zona Anti Korupsi (Jumlah)	10	95 ^{K)}	
1.8	Penanganan Pengaduan Masyarakat	Penanganan Dumas	Kasus siap LIDIK (Jumlah)	56	392 ^{K)}	25,0
2	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPK	Efektivitas Dukungan Manajemen dan Teknis Lain	Tingkat Kepuasan Layanan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya (Indeks, Skala 1-5))	3	3,5	2.102,7
2.1	Manajemen Sumber Daya Manusia	Sumber Daya Manusia	Tingkat Layanan (SLA Biro SDM) dan Kepuasan Pegawai (Indeks, Skala 1-5)	3,25	3,29	1.973,0
TOTAL ALOKASI KPK 2010-2014						3.052,0

K : Angka kumulatif 5 tahun (2010-2014)

**RENCANA TINDAK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH 2010-2014
PER KEMENTERIAN/LEMBAGA**

KEMENTERIAN/LEMBAGA : DEWAN PERWAKILAN DAERAH

NO	PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
1	Program Penguatan Kelembagaan DPD dalam Sistem Demokrasi	Terselenggara-nya pelaksanaan fungsi legislasi, pertimbangan, dan pengawasan DPD serta penyerapan aspirasi masyarakat dan daerah dan akuntabilitas kinerja Anggota DPD	1. Terselenggaranya pelaksanaan kegiatan dalam lingkup penyusunan Program Legislasi Nasional;			1.062,4
			2. Terselenggaranya pelaksanaan kegiatan dalam lingkup penyusunan RUU usul DPD RI;			
			3. Terselenggaranya pelaksanaan kegiatan dalam lingkup penyusunan Pandangan/ Pendapat DPD RI atas RUU tertentu;			
			4. Terselenggaranya pelaksanaan dalam penyusunan Pertimbangan DPD tentang APBN;			
			5. Terselenggaranya pelaksanaan penyusunan Pertimbangan DPD terhadap Hapses BPK;			
			6. Terselenggaranya pelaksanaan kegiatan dalam lingkup penyusunan pertimbangan DPD RI atas RUU Tertentu;			
			7. Terselenggaranya kegiatan penyusunan pertimbangan PAW Anggota BPK;			
			8. Terselenggaranya pelaksanaan kegiatan dalam lingkup penyusunan Pengawasan DPD RI atas UU tertentu;			

KEMENTERIAN/LEMBAGA : DEWAN PERWAKILAN DAERAH

NO	PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
			9. Terselenggaranya pelaksanaan kegiatan dalam lingkup penguatan fungsi kelembagaan DPD RI;			
			10. Terselenggaranya pelaksanaan kegiatan penyerapan aspirasi masyarakat dan daerah dan akuntabilitas kinerja DPD RI;			
			11. Kesesuaian program dan kegiatan DPD di dalam Renja dengan RKP.	100%	100%	
1.1	Kegiatan Dukungan Penyelenggara-an Fungsi legislasi, Pertimbangan. Pengawasan DPD dan pengembangan kerja sama DPD (Biro Persidangan I)	§ Terselenggaranya dukungan Persidangan Komite I, Komite III, PPUU, Pansus/ kelompok DPD di MPR, dan PKALP untuk pelaksana-an fungsi legislasi, pertimbangan dan pengawas-an DPD.	1. % Jumlah Penyusunan Pandangan/ Pendapat DPD atas RUU Tertentu yang diterima dari DPR;	100%	100%	472,0
			2. % jumlah penyusunan Pertimbangan DPD atas RUU Tertentu yang diterima dari DPR;	100%	100%	
			3. % tindak lanjut oleh DPR terhadap hasil Pengawasan DPD atas UU Tertentu;	100%	100%	
			4. % jumlah RUU Usul DPD yang ditindaklanjuti oleh DPR (terhadap jumlah RUU yang diajukan);	100%	100%	
			5. % jumlah aspirasi masyarakat dan daerah yang diperjuangkan oleh Anggota DPD;	100%	100%	
			6. Jumlah rapat KOMITE I, KOMITE III, PPUU, Pansus/Kelompok DPD di MPR, dan PKALP dalam rangka pelaksanaan tugas fungsi legislasi, pertimbangan dan pengawasan DPD;			
			7. Tersedianya materi sesuai dengan lingkup tugas KOMITE I, KOMITE III, PPUU, Pansus/Kelompok DPD di MPR, dan PKALP secara komprehensif.			

KEMENTERIAN/LEMBAGA : DEWAN PERWAKILAN DAERAH

NO	PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
1.2	Dukungan Penyelenggara-an Fungsi Legislasi, Pertimbangan, Pengawasan DPD dan Fungsi Badan Kehormatan (Biro Persidangan II)	Terselenggara-nya dukungan Persidangan KOMITE II, KOMITE IV, persidangan paripurna/panmus, dan Badan Kehormatan dalam lingkup pelaksanaan legislasi, pertimbangan, pengawasan DPD serta penegakan kode etik.	1. Jumlah rapat KOMITE II, KOMITE IV, Persidangan Paripurna/ Panmus, dan Badan Kehormatan dalam rangka pelaksanaan fungsi legislasi, pertimbangan, pengawasan, dan fungsi badan kehormatan, 2. % Jumlah Penyusunan Pandangan/ Pendapat DPD atas RUU Tertentu yang diterima dari DPR; 3. % jumlah penyusunan Pertimbangan DPD atas RUU Tertentu yang diterima dari DPR; 4. % tindak lanjut oleh DPR terhadap hasil Pengawasan DPD atas UU Tertentu; 5. % jumlah RUU Usul DPD yang ditindaklanjuti oleh DPR (terhadap jumlah RUU yang diajukan); 6. Jumlah set risalah persidangan dan rapat; 7. Tersedianya materi sesuai dengan lingkup tugas KOMITE II, KOMITE IV, Persidangan Paripurna/panmus, dan BK secara komprehensif; 8. Terselenggaranya penyusunan risalah secara tepat waktu .			292,1
1.3	Kegiatan Dukungan Penyerapan Aspirasi Masyarakat dan Daerah dan Akuntabilitas Kinerja Anggota DPD	Terselenggara-nya kegiatan penyerapan aspirasi masyarakat dan daerah dan akuntabilitas kinerja DPD di 33 provinsi	1. Jumlah rapat dalam rangka penyerapan aspirasi masyarakat dan daerah yang dilaksanakan di 33 Provinsi	33	165 ^{K0}	130,9

KEMENTERIAN/LEMBAGA : DEWAN PERWAKILAN DAERAH

NO	PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
	(Pusat Kajian Daerah)		2. Jumlah rapat dengan pemda, DPRD, dan unsur masyarakat lainnya dalam rangka penyerapan aspirasi masyarakat daerah (asmasda) dan tindak lanjut asmasda yang dilanjutkan di 33 provinsi.	33	165 ^{KJ}	
			3. Jumlah kegiatan temu konstituen dalam pelaksanaan akuntabilitas kinerja anggota DPD yang dilaksanakan di 33 provinsi	66	330 ^{KJ}	
			8. % Anggota DPD yang melakukan kegiatan komunikasi dan konsultasi publik dalam rangka akuntabilitas kinerja	100%	100%	
2	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Lainnya DPD RI (Sekretariat Jenderal DPD RI)	Terselenggara-nya pelaksana-an kinerja Biro Administrasi Biro Sekretariat Pimpinan, Biro Perencanaan dan keuangan, Pusat Data dan Informasi, Pusat Kajian Daerah, Pusat Kajian Kebijakan dan Hukum Setjen DPD RI Meningkatnya kualitas dukungan administratif dan keahlian kepada DPD.	1. Terselenggaranya kegiatan perencanaan dan pengelolaan keuangan DPD RI	100%	100%	1.356,1
			2. Terselenggaranya kegiatan pelayanan kesekretariatan Pimpinan DPD RI	12 bulan	12 bulan	
			3. Terselenggaranya kegiatan administrasi keanggotaan dan kepegawaian, penataan organisasi dan tata laksana, pelayanan tata usaha dan pengawasan internal Setjen DPD RI	12 bulan	12 bulan	
			4. Terselenggaranya kegiatan penyediaan data dan teknologi informasi	12 bulan	12 bulan	
			5. Terselenggaranya kegiatan pengkajian aspirasi masyarakat dan daerah	100% aspirasi masyarakat dan daerah dikaji	100% aspirasi masyarakat dan daerah dikaji	

KEMENTERIAN/LEMBAGA : DEWAN PERWAKILAN DAERAH

NO	PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
			6. Terselenggaranya kegiatan pengkajian kebijakan dan hukum	100% kebijakan dan hukum dapat dikaji	100% kebijakan dan hukum dapat dikaji	
2.1	Kegiatan Administrasi perencanaan dan pengelolaan keuangan DPD RI (Biro Perencanaan dan Keuangan)	Terselenggara-nya dukungan perencanaan dan pengelolaan keuangan DPD RI sesuai dengan SOP	1. % kesesuaian kegiatan dan program di Renja dengan RKP;	100%	100%	736,8
			2. Jumlah set penyusunan perencanaan program dan anggaran DPD RI;			
			3. Jumlah dokumen anggaran kegiatan yang direalisasikan;	100%	100%	
			4. Jumlah dokumen pertanggung-jawaban anggaran kegiatan DPD yang diverifikasi;	100%	100%	
			5. % gaji dan tunjangan bagi anggota dan pegawai yang dibayarkan dengan tepat waktu ;	100%	100%	
			6. Jumlah perjanjian kerja sama antara DPD RI dan lembaga/negara donor dalam kerangka peningkatan kapasitas kelembagaan DPD RI dan Setjen DPD RI.	3	15 ^{K)}	
			7. Terselenggaranya dukungan perencanaan secara komprehensif untuk menghimpun seluruh usulan kegiatan DPD RI;	100%	100%	
			8. Tersedianya dukungan keuangan untuk pelaksanaan kegiatan DPD RI secara optimal;	100%	100%	
			9. Terselenggaranya dukungan pengelolaan gaji dan tunjangan bagi anggota DPD RI dan tunjangan bagi anggota DPD RI dan pegawai Setjen DPD RI;	100%	100%	

KEMENTERIAN/LEMBAGA : DEWAN PERWAKILAN DAERAH

NO	PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
			10. Terselenggaranya kerja sama DPD RI dan negara/lembaga donor dalam upaya peningkatan kapasitas kelembagaan DPD RI dan Setjen DPD RI;	100%	100%	
			11. Terselenggaranya penyusunan laporan keuangan DPD dan Setjen DPD.	1	1 WTP	
2.2	Kegiatan Pengelolaan Kesekretariatan dan Keprotokolan Pimpinan DPD (Biro Sekretariat Pimpinan)	Terselenggaranya pelayanan penerimaan tamu/delegasi, penatausahaan rapat dan administrasi serta keprotokolan bagi pimpinan DPD RI	1. Jumlah penerimaan tamu/delegasi Pimpinan DPD RI selama 12 bulan 2. Jumlah kegiatan rapat musyawarah Pimpinan DPD RI selama 12 bulan 3. Jumlah penatausahaan surat bagi Pimpinan DPD RI selama 12 bulan 4. Terselenggaranya dukungan keprotokolan bagi Pimpinan DPD RI secara optimal 5. Terselenggaranya kegiatan penerimaan tamu/delegasi pimpinan DPD RI secara optimal 6. Terselenggaranya kegiatan rapat musyawarah Pimpinan secara optimal	100%	100%	45,9
2.3	Pengelolaan dan pengkajian aspirasi masyarakat dan daerah (Pusat Kajian Daerah)	Terselenggaranya kegiatan penyerapan, penghimpunan, pengolahan dan pengkajian aspirasi masyarakat dan daerah.	1. Jumlah aspirasi masyarakat dan daerah yang dihimpun selama 12 bulan 2. Jumlah kajian aspirasi masyarakat dan daerah selama 12 bulan 3. Jumlah kantor DPD di daerah yang terbentuk selama 12 bulan	34	136 ^{KI} 33 ^{KI}	125,0
2.4	Kegiatan Pengolahan Data dan Teknologi Informasi (Pusat Data dan Informasi)	Terselenggaranya pengolahan data dan teknologi informasi dalam mendukung tugas dan fungsi DPD RI.	1. Frekuensi peliputan media visual kegiatan DPD RI 2. Jumlah pencetakan bahan-bahan untuk mendukung kegiatan sosialisasi dan pelaksanaan tugas fungsi DPD RI selama 12 bulan	100%	100%	10,5

KEMENTERIAN/LEMBAGA : DEWAN PERWAKILAN DAERAH

NO	PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
			3. Jumlah pengadaan buku perpustakaan	100%	100%	
			4. Frekuensi sosialisasi kegiatan DPD RI melalui website dan <i>web blog</i> DPD RI	100%	100%	
2.5	Kegiatan Penyelenggara-an Pengkajian Kebijakan dan Hukum (Pusat Kajian Kebijakan dan Hukum)	Terselenggara-nya kegiatan pengkajian kebijakan dan hukum untuk mendukung Tupoksi DPD RI	1. Jumlah kajian kebijakan dalam mendukung tupoksi DPD RI	3	15 ^{KI}	347,3
			2. Jumlah kajian hukum dalam mendukung tupoksi DPD RI	3	15 ^{KI}	
			3. Jumlah naskah pidato dan sambutan DPD RI	10	50 ^{KI}	
2.6	Kegiatan Penatausahaan Organisasi, Keanggotaan, SDM dan Pengawasan Internal (Biro Administrasi)	Penyelenggaraan kegiatan ketatausaha-an, organisasi, dan tata laksana, pengadministrasian keanggotaan dan kepegawaian serta pengawasan internal	1. Jumlah dokumentasi arsip dan surat-surat DPD RI			90,6
			2. Jumlah bahan-bahan DPD RI yang digandakan			
			3. Jumlah set SOP pelaksanaan tugas Setjen DPD RI			
			4. Jumlah set LAKIP	1	5 ^{KI}	
			5. Jumlah set laporan pengawasan internal			
			6. Jumlah set review laporan keuangan DPD RI			
			7. Jumlah diklat struktural dan, teknis, pra jabatan, dan rintisan gelar bagi pegawai setjen DPD RI			
			8. Terselenggaranya kegiatan dokumentasi kearsipan DPD RI secara optimal			

KEMENTERIAN/LEMBAGA : DEWAN PERWAKILAN DAERAH

NO	PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
3	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur DPD RI (Setjen DPD RI)	Terselenggaranya pelaksanaan kinerja Biro Umum	1. Terselenggaranya kegiatan pemeliharaan gedung dan perkantoran	12 bulan	12 bulan	193,2
			2. Tersedianya dukungan pengadaan sarana dan prasarana peralatan kantor	12 bulan	12 bulan	
			3. Tersedianya dukungan pembangunan gedung perkantoran DPD RI	12 bulan	12 bulan	
			4. Terselenggaranya kegiatan pengamanan gedung dan kegiatan DPD RI	12 bulan	12 bulan	
			Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai, baik di lingkup DPD maupun Setjen DPD	% pemenuhan kebutuhan bagi pimpinan, anggota DPD maupun Sekretariat DPD		
3.1	Kegiatan Penyelenggara-an Pelayanan Umum Sarana dan Pra Sarana DPD RI (Biro Umum)	Terselenggaranya kegiatan pemeliharaan gedung, pengadaan dan inventarisasi barang milik negara, kegiatan akomodasi dan angkutan serta pengamanan DPD RI	1. Jumlah pemeliharaan gedung dan peralatan perkantoran DPD RI	12 bulan	12 bulan	193,2
			2. Jumlah pengadaan sarana dan pra sarana perkantoran serta kegiatan penatausahaan barang milik negara selama 12 bulan	12 bulan	12 bulan	
			3. Jumlah dukungan penyelenggara-an rapat-rapat di luar gedung DPD RI	12 bulan	12 bulan	
			4. Jumlah dukungan pengamanan gedung DPD RI dan kegiatan-kegiatan DPD RI	12 bulan	12 bulan	
			TOTAL ALOKASI DPD 2010-2014			

K : Angka kumulatif 5 tahun (2010-2014)

**RENCANA TINDAK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH 2010-2014
PER KEMENTERIAN/LEMBAGA**

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KOMISI YUDISIAL

NO	PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
1.	Program Dukungan manajemen & pelaksanaan tugas teknis lainnya Komisi Yudisial	Meningkatnya dukungan teknis administratif kepada Komisi Yudisial di bidang pembiayaan kegiatan, peningkatan SDM, akuntabilitas serta pelayanan publik	Mewujudkan pemberian pelayanan yang handal oleh Komisi Yudisial bagi publik pencari keadilan			314,7
1.1	Penyelenggaraan perencanaan dan pengelolaan keuangan perlengkapan rumah tangga serta tata usaha dan pengembangan sumber daya manusia di lingkungan Komisi Yudisial	Terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan, pengelolaan administrasi keuangan, perlengkapan, dan rumah tangga, serta tata usaha dan pengembangan SDM di lingkungan Komisi Yudisial	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah dokumen anggaran yang disusun - Jumlah MoU Komisi Yudisial yang ditindaklanjuti - Jumlah penelaahan dan bantuan hukum yang ditangani hingga tuntas - % laporan keuangan yang sesuai dengan Sistem Akuntansi Pemerintah - % ketersediaan arsip dalam memenuhi kebutuhan administrasi dan keuangan - Pendapat yang dikeluarkan oleh eksternal auditor atas laporan keuangan - % sumber daya manusia yang memiliki kemampuan dan keahlian sesuai bidangnya - Biaya rata-rata pelaksanaan administrasi umum 	<ul style="list-style-type: none"> 10 10 20 100% 100% Opini BPK WTP 70% Penghematan 20% 	<ul style="list-style-type: none"> 50^{K)} 50^{K)} 100^{K)} 100% 100% Opini BPK WTP 90% Penghematan 20% 	295,7
2.	Program peningkatan kinerja seleksi Hakim Agung dan pengawasan perilaku hakim	Mewujudkan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang bersih dan berwibawa	<ul style="list-style-type: none"> 1. Menurunnya jumlah laporan pengaduan masyarakat tentang dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim 2. Terciptanya sumber daya hakim menjadi insan yang mengabdikan dan menegakkan hukum dan keadilan 			93,3

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KOMISI YUDISIAL

NO	PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
2.1	Seleksi Hakim Agung, seleksi hakim dan Pemberian Penghargaan Hakim	Memperoleh calon Hakim Agung kompeten untuk diajukan ke DPR, serta pemberian apresiasi terhadap kinerja para hakim, serta hakim yang kompeten untuk bertugas dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, dan peradilan tata usaha negara	- Jumlah calon Hakim Agung yang mendaftar	80	333 ^{K)}	45,8
			- Jumlah calon Hakim Agung yang lulus seleksi	6	72 ^{K)}	
			- Jumlah hakim berprestasi yang diusulkan menerima penghargaan	4	20 ^{K)}	
			- Jumlah pelaksanaan monitoring profesionalisme Hakim Agung	1	9 ^{K)}	
			- Jumlah putusan hakim tingkat pertama, tingkat banding, dan MA yang diteliti dan dianalisa	200	1000 ^{K)}	
			- % putusan hakim yang amar putusannya sesuai dengan pertimbangan hukum serta fakta hukum	100%	100%	
			- Biaya maksimal kegiatan penelitian putusan hakim (dlm ribu)	Rp 50.000	Rp 50.000	
			- % peserta yang mendaftar dalam seleksi calon Hakim Agung	75%	85%	
			- % Hakim Agung yang profesional hasil seleksi	75%	85%	
			- % calon Hakim Agung yang lulus seleksi	75%	85%	
			- % calon hakim yang lolos pemberian penghargaan	75%	90%	
			- Jumlah peserta seleksi calon hakim yang mendaftar	1000	5700 ^{K)}	
			- Jumlah peserta seleksi calon hakim yang lulus seleksi	500	2850 ^{K)}	
			- % peserta seleksi calon hakim yang lulus sesuai kompetensi	80%	80%	

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KOMISI YUDISIAL

NO	PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
			- Biaya rata-rata seleksi calon hakim	Penghematan 20%	Penghematan 20%	
			- Biaya rata-rata kegiatan seleksi Hakim Agung per pendaftar (dlm ribu)	Rp 32.500	Rp 51.240	
			- Biaya rata-rata kegiatan usulan pemberian penghargaan hakim (dmln ribu)	Rp 1.000.000	Rp 1.200.000	
2.2	Pelayanan pengawasan perilaku hakim dan peningkatan kompetensi hakim	Penyelesaian laporan pengaduan hakim yang diduga melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim, serta meningkatnya kemampuan dan profesionalisme hakim	- Jumlah pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim	1719	7029 ^{K)}	47,5
			- Jumlah sidang pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim yang diproses melalui Majelis Kehormatan Hakim (MKH)	15	105 ^{K)}	
			- % pengaduan masyarakat yang ditangani hingga tuntas	70%	75%	
			- % hasil putusan Majelis Kehormatan Hakim yang sesuai dengan prinsip-prinsip dalam kode etik dan pedoman perilaku hakim	100%	100%	
			- Jumlah pelatihan kemampuan dan profesionalisme hakim yang dilaksanakan	5	33 ^{K)}	
			- % Peningkatan kemampuan dan profesionalisme hakim	80%	90%	
			- Biaya rata-rata pelaksanaan pelatihan	Penghematan 20%	Penghematan 20%	
			- Biaya rata-rata penanganan laporan pengaduan masyarakat hingga tuntas	Penghematan 20%	Penghematan 20%	
3.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Komisi Yudisial	Meningkatnya sarana dan prasarana kantor untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Yudisial	Meningkatnya penyelesaian pelaksanaan tugas oleh Komisi Yudisial secara cepat dan efisien dengan sarana dan prasarana yang memadai			
TOTAL ALOKASI KOMISI YUDISIAL 2010-2014						417,4

K : Angka kumulatif 5 tahun (2010-2014)

**RENCANA TINDAK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH 2010-2014
PER KEMENTERIAN/LEMBAGA**

KEMENTERIAN/LEMBAGA : BNPB

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
I	Program Penanggulangan Bencana					1.826,8
1	Pencegahan dan pengurangan risiko bencana	1. Tersusunnya dokumen rencana aksi daerah pengurangan risiko bencana	1. Jumlah rencana aksi daerah pengurangan risiko bencana yang tersusun (Provinsi & kab/Kota)	23 & 48	33 (s/d 2011) & 275	148,6
		2. Terlaksananya dukungan pembentukan kelembagaan penanggulangan bencana daerah	2. Terbentuknya kelembagaan penanggulangan bencana daerah (Provinsi & kab/Kota)			
2	Pemberdayaan masyarakat dalam kesiapan menghadapi bencana	Meningkatnya kapasitas aparatur dan terlaksananya pembinaan kelembagaan pemerintah dan masyarakat dalam penanggulangan bencana di daerah	Terlaksananya pelatihan dan pembinaan aparatur dan masyarakat dalam penanggulangan bencana di daerah (Provinsi & kab/Kota)	23 & 48	33 (s/d 2011) & 275	34,5
3	Penyiapan peralatan dan logistik dikawasan rawan bencana	1. Pemenuhan kebutuhan logistik kebencanaan	1. Terlaksananya pemenuhan kebutuhan logistik kebencanaan (Provinsi & kab/Kota)	16 & 0	17 (s/d 2012) & 77	460,4
		2. Pendistribusian logistik kebencanaan pada daerah bencana	2. Terlaksananya pendistribusian logistik kebencanaan pada daerah bencana (Provinsi & kab/Kota)			
4	Penyiapan peralatan dan logistik dikawasan rawan bencana	1. Pemenuhan kebutuhan peralatan kebencanaan	1. Terlaksananya Pemenuhan kebutuhan peralatan kebencanaan (Provinsi & kab/Kota)	16 & 0	17 (s/d 2012) & 77	289,6
		2. Pendistribusian peralatan kebencanaan pada daerah bencana	2. Terlaksananya pendistribusian peralatan kebencanaan pada daerah bencana V			
5	Pengembangan aplikasi teknologi informasi dan komunikasi untuk pengurangan risiko dan mitigasi bencana alam	1. Tersedianya data spasial kebencanaan	1. Tersedianya data spasial kebencanaan	5	33 ^{K)}	148,3
		2. Tersedianya sistem informasi penanggulangan bencana	2. Tersedianya sistem informasi penanggulangan bencana			

KEMENTERIAN/LEMBAGA : BNPB

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
6	Kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana	1. Terlaksananya pendampingan dalam penyusunan rencana kontijensi	1. Jumlah rencana kontijensi yang tersusun dan	5	8	1.915,3
		2. Terlaksananya kesiapsiagaan dengan pembentukan satuan reaksi cepat penanggulangan bencana (SRC-PB)	2. Terbentuknya satuan reaksi cepat (SRC-PB) yang terbentuk			
7	Tanggap darurat di daerah terkena bencana	Koordinasi dan pelaksanaan penanganan tanggap darurat dipusat dan daerah	Terlaksananya koordinasi dan pelaksanaan penanganan tanggap darurat dipusat dan daerah	55	175	137,9
8	Penanganan pengungsi akibat bencana	Penanganan pengungsi akibat bencana secara efektif dan terpadu	Terlaksananya penanganan pengungsi akibat bencana secara efektif dan terpadu	55	175	12,9
9	Rehabilitasi dan rekonstruksi bidang prasarana fisik di wilayah pasca bencana	Koordinasi dan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi bidang prasarana fisik di wilayah pasca bencana (Jawa Barat, Sumatera Barat dan Wilayah Pasca Bencana lainnya)	Terlaksananya koordinasi dan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi bidang prasarana fisik di wilayah pasca bencana (Jawa Barat, Sumatera Barat dan Wilayah Pasca Bencana lainnya)	15	30	13,4
10	Rehabilitasi dan rekonstruksi bidang sosial ekonomi di wilayah pasca bencana	Koordinasi dan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi bidang prasarana sosial ekonomi di wilayah pasca bencana (Jawa Barat, Sumatera Barat dan Wilayah Pasca Bencana lainnya)	Terlaksananya koordinasi dan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi bidang prasarana sosial ekonomi di wilayah pasca bencana (Jawa Barat, Sumatera Barat dan Wilayah Pasca Bencana lainnya)	15	30	19,2
II	Dukungan manajemen dan pelaksanaan teknis lainnya.					53,0
III	Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur BNPB					339,8
IV	Pengawasan Dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur BNPB					19,5
TOTAL ALOKASI BNPB 2010-2014						2.239,1

K : Angka kumulatif 5 tahun (2010-2014)

**RENCANA TINDAK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH 2010-2014
PER KEMENTERIAN/LEMBAGA**

KEMENTERIAN/LEMBAGA: BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA

No	PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
1.	PROGRAM PENINGKATAN FASILITASI PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TKI	Meningkatnya kualitas penempatan dan perlindungan pekerja migran	a. Terlaksananya peningkatan pelayanan dokumen calon pekerja migran b. Jumlah calon pekerja migran yang Terlayani KTKLN yang dikeluarkan oleh BNP2TKI sesuai dengan NIK c. Kemudahan penyampaian pengaduan			1.225,8
	- Kegiatan Prioritas Bidang					706,0
	a. Fasilitasi Pelayanan Dokumen Calon TKI	Meningkatnya kualitas pelayanan penempatan calon pekerja migran	Jumlah calon pekerja migran yang mendapat layanan dokumen sesuai standar	500 ribu pekerja migran	4,5 juta pekerja migran ^{K)}	19,4
	b. Penyiapan Pemberangkatan	Meningkatnya pemahaman hak dan kewajiban pekerja migran	a. persentase jumlah calon pekerja migran yang ditempatkan sesuai dengan <i>job order</i> b. Jumlah calon pekerja migran yang terlayani KTKLN yang dikeluarkan oleh BNP2TKI sesuai dengan NIK c. Jumlah pekerja migran yang diberi pembekalan akhir pemberangkatan dengan silabus yang memenuhi standar perlindungan dan prinsip-prinsip HAM.	100% pekerja migran ditempatkan sesuai dengan <i>job order</i> 500 ribu pekerja migran 500 ribu pekerja migran	100% pekerja migran ditempatkan sesuai dengan <i>job order</i> 4,5 juta pekerja migran ^{K)} 4,5 juta pekerja migran ^{K)}	110,0 174,0 244,0

KEMENTERIAN/LEMBAGA: BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA

No	PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
	c. Pelayanan Advokasi dan Perlindungan Hukum	Terlaksananya pelayanan advokasi dan perlindungan hukum pekerja migran	a. Kemudahan penyampaian pengaduan		1 <i>hotline service</i> 24 jam (bebas pulsa)	20,0
			b. Jumlah pengaduan yang ditangani	100% pengaduan tertangani	100% pengaduan tertangani	15,0
			c. Kualitas pelayanan <i>hotline service</i>		100% pekerja migran yang diproses melalui <i>hotline service</i> dalam waktu 24 jam	30,0
			d. Persentase calon pekerja migran yang mendapat advokasi		100% orang yang berminat menjadi pekerja migran teradvokasi	30,0
			e. Persentase pekerja migran purna bermasalah yang direhabilitasi	60% pekerja migran bermasalah ditangani	100% pekerja migran bermasalah ditangani	40,0
	d. Pengamanan Keberangkatan	Pencegahan keberangkatan pekerja migran non prosedural	Persentase pekerja migran yang memiliki dokumen resmi bekerja ke luar negeri	100% pekerja migran bekerja dengan dokumen resmi	100% pekerja migran bekerja dengan dokumen resmi	15,0
	e. Peningkatan Pemberdayaan TKI Purna	Kesadaran pengelolaan remitansi untuk kegiatan produktif	Jumlah pekerja calon migran/ purna yang mendapat edukasi pengelolaan remitansi	2000 pekerja migran	17.000 pekerja migran ^{K)}	8,6
2.	PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS BNP2TKI					294,3
TOTAL ALOKASI BNP2TKI 2010-2014						1.520,1

K : Angka kumulatif 5 tahun (2010-2014)

**RENCANA TINDAK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH 2010-2014
PER KEMENTERIAN/LEMBAGA**

KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO

No	PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil Outcomes/ Output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
I	Penanggulangan Bencana Lumpur Sidoarjo	1) Memberikan rasa aman kepada penduduk yang bermukim di wilayah pengaruh bencana lumpur Sidoarjo; 2) Terpenuhi hak-hak dasar warga terdampak sesuai dengan ketentuan dalam Perpres; 3) Terjaganya kemampuan dan keamanan Kali Porong dalam mengalirkan luapan lumpur dan banjir; 4) Terjaganya kemampuan tanggul dalam menahan lumpur; 5) Berfungsinya infrastruktur jalan alternatif dan jalan relokasi				7.120,0
1	Perencanaan operasi luapan lumpur	Meningkatnya kualitas penyusunan perencanaan pengaliran luapan lumpur ke Kali Porong				16,3
			Survey Geologi	3 laporan	7laporan ^{K)}	4,5
			Pemantauan bawah permukaan	1 laporan	5 laporan ^{K)}	3,1

KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO

No	PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil Outcomes/ Output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
2	Penanganan luapan lumpur	Terlaksananya pengaliran luapan lumpur ke Kali Porong				800,4
			Penanganan pengaliran luapan lumpur	beroperasinya 6 unit kapal keruk, 27 juta m ³	beroperasinya ^{K)} 12 unit kapal keruk, 48 juta m ³	800,4
3	Mitigasi dan penanganan bencana geologi dan monitoring lingkungan	Meningkatnya kemampuan penyediaan data dan informasi fenomena geologi dan penanganan bencana geologi.				8,5
			Pemantauan dan penanganan mitigasi	1 laporan	5 laporan ^{K)}	8,3
4	Perencanaan dan pengelolaan pemulihan sosial	Meningkatnya kualitas penyusunan rencana di bidang sosial masyarakat				14,1
			Pendidikan dan pelatihan teknis/keterampilan.	10 angkatan (400 orang)	50 angkatan ^{K)} (2.000 orang)	8,9
5	Pengelolaan penanganan bantuan sosial	Terselenggaranya bantuan sosial masyarakat warga terdampak akibat semburan dan luapan lumpur Sidoarjo				97,8
			Bantuan sosial yang berupa bantuan kontrak rumah			
			a) warga 3 desa (Besuki, Kedungcangkring, Pejarakan)	1.666 KK/ 6.094 jiwa	6.664 ^{K)} KK/24.376 jiwa	17,9
			b) warga 9 RT (Jatirejo, Siring, Mindi)	900 KK/ 2.970 jiwa	3.600 ^{K)} KK/11.880 jiwa	9,4
	c) warga di luar PAT			10.412 ^{K)} KK/37.510 jiwa	62,4	

KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO

No	PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil Outcomes/ Output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
6	Peningkatan dan pengelolaan perlindungan sosial	Terlaksananya perlindungan sosial terhadap warga terdampak akibat semburan dan luapan lumpur Sidoarjo				4.064,9
			Pembayaran jual beli tanah dan bangunan di 3 desa	1.800 bidang	5.400 bidang ^{K)}	340,9
			Pembayaran jual beli tanah dan bangunan diluar peta area terdampak		535 ha ^{K)}	3.723,3
7	Perencanaan pembangunan infrastruktur	Meningkatkan kualitas penyusunan rencana penanganan infrastruktur dan relokasi infrastruktur				27,0
			Disain dan Supervisi Pembangunan Jalan Arteri dan PDAM KMS	1 paket	7 paket ^{K)}	8,0
			Disain dan Supervisi Pembangunan Infrastruktur Luapan Lumpur	3 paket	9 paket ^{K)}	19,0
8	Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur luapan lumpur	Meningkatnya pengelolaan dan pengawasan pembangunan/pemeliharaan penanganan infrastruktur akibat luapan lumpur Sidoarjo				1.352,2
			Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur luapan lumpur			532,4
			a) terbangun tanggul luar 3 desa dan Gempolsari panjang total sekurang-kurangnya 3.500 m	3.500 m	3.500 m	

KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO

No	PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil Outcomes/ Output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
			b) selesainya perbaikan saluran irigasi dan drainase dengan panjang masing-masing sekurang-kurangnya 1.500 m	1.500 m	1.500 m	
			c) perbaikan sistem drainase dan Kali Ketapang sepanjang 22 km dan saluran irigasi		22 km ^{K)}	
			d) selesainya normalisasi alur Kali Porong di muara melalui pengerukan endapan sebesar 500.000 m ³	500.000 m ³	500.000 m ³	
			e) selesainya peningkatan/pemeliharaan jalan dengan panjang total jalan lingkungan Mindi 1,5 km	1,5 km	1,5 km	
			Penataan dan pengembangan wilayah berdekatan PAT		14 paket ^{K)}	181,6
			Revitalisasi Kali Ketapang			544,3
			a) pembebasan tanah 53,25 ha		53,25 ha	
			b) normalisasi Kali Ketapang 24 km		24 km ^{K)}	

KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO

No	PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil Outcomes/ Output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
			c) pembuatan jalan inspeksi Kali Ketapang 20 km		20 km ^{K)}	
			d) normalisasi Kali Jatianom, Kali Datar dan Kali Bunyuk total 21 km		21 km	
			Penataan dan pengembangan muara Kali Porong			94,0
			a) pembuatan dermaga beserta fasilitasnya		1 paket	
			b) perbaikan/peningkatan jalan Porong ke muara Kali Porong total 17 km		17 km ^{K)}	
9	Pembangunan relokasi Infrastruktur	Meningkatnya pengelolaan dan pengawasan pembangunan/ pemeliharaan penanganan infrastruktur pengganti akibat luapan lumpur Sidoarjo	Melanjutkan pengadaan tanah	24,76 ha	24,76 ha	738,9
			Pembangunanrelokasi jalan arteri	9,9 km	9,9 km	174,8
			Pembangunan simpang susun Kesambi		1 paket	199,1
			Pembangunan relokasi pipa PDAM		2 pipa diameter 450 mm @ 7,1 km	150,0
			Pelapisan aspal beton jalan arteri		2 x 7,1 km	75,0
						30,0

KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO

No	PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil Outcomes/ Output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
			Pembuatan landscaping di kiri – kanan jalan Relokasi Arteri Porong		2 x 7,1 km	20,0
			Pembangunan relokasi ruas di desa Pamotan		1.5 km	90,0
II	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo					90,8
TOTAL ALOKASI BPLS 2010-2014						7.210,8

K : Angka kumulatif 5 tahun (2010-2014)

**RENCANA TINDAK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH 2010-2014
PER KEMENTERIAN/LEMBAGA**

KEMENTERIAN/LEMBAGA : LEMBAGA PENGEMBANGAN KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH (LKPP)

NO	PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
1.	PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA LKPP	Terlaksananya penyempurnaan fungsi dan struktur organisasi LKPP	- Reorganisasi yang dilakukan sesuai dengan fungsi dan kebutuhan LKPP	-	2 ^{K)}	244,5
		Terpenuhinya SDM yang kompeten	- Persentase pemenuhan kebutuhan pegawai	60%	100%	
			- Persentase pegawai LKPP yang kompetensinya sesuai dengan penugasan	100%	100%	
			- Persentase pengurangan jumlah tenaga outsourcing	-	30%	
		Terlaksananya sistem kerja di lingkungan LKPP yang efektif	- Persentase kegiatan kantor yang telah ada SOP-nya	70%	100%	
			- Persentase implementasi pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan SOP	40%	100%	
2.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR LKPP	Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana LKPP	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana	70%	100%	214,4
3.	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH	Terwujudnya pelaksanaan bimbingan teknis pengadaan barang/jasa pemerintah di seluruh Kementerian/Lembaga/Daerah/Instansi Lainnya	Persentase jumlah Kementerian/ Lembaga/Daerah/Instansi Lainnya yang sudah diberikan bimbingan teknis di bidang pengadaan barang/jasa	10%	50%	355,0
		Terwujudnya pelaksanaan advokasi pengadaan barang/jasa pemerintah di seluruh Kementerian/ Lembaga/ Daerah/Instansi lainnya	Persentase peningkatan jumlah Kementerian/ Lembaga/Daerah/Instansi Lainnya yang sudah diberikan advokasi di bidang pengadaan barang/jasa	60%	100%	
		Terwujudnya pembinaan dalam penanganan pengaduan dan pemberian rekomendasi penyelesaian sengketa banding pengadaan barang/jasa pemerintah di seluruh Kementerian/Lembaga/Daerah/ Instansi Lainnya	Persentase Peningkatan jumlah pengaduan dan sengketa banding pengadaan barang/jasa di Kementerian/ Lembaga/Daerah/Instansi lainnya yang terselesaikan	60%	100%	

KEMENTERIAN/LEMBAGA : LEMBAGA PENGEMBANGAN KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH (LKPP)

NO	PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITYAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
		Terselesaikannya sengketa kontrak dan sengketa audit pengadaan barang/ jasa pemerintah di seluruh Kementerian/ Lembaga/Daerah/ Instansi lainnya	Persentase Peningkatan jumlah sengketa kontrak dan sengketa audit pengadaan barang/jasa yang terselesaikan	60%	100%	
		Terselesaikannya kasus korupsi, perdata, persaingan usaha dan tata usaha negara di bidang pengadaan barang/jasa.	Persentase Peningkatan jumlah pendapat hukum dan kesaksian ahli di bidang pengadaan barang/jasa yang dipedomani aparat penyelidik dan penyidik, serta hakim pengadilan/persaingan usaha	60%	100%	
		Terwujudnya koordinasidan sinkronisasi perencanaan pengadaan barang/ jasa dalam rangka penyusunan Renja-KL dan RKA-KL yang akurat	Jumlah instansi pemerintah yang melaksanakan perencanaan pengadaan barang/jasa pemerintah	6	81 ^(K)	
		Terwujudnya koordinasi dan sinkronisasi monitoring-evaluasi pelaksanaan pengadaan berdasarkan prinsip pengadaan barang/jasa	Jumlah instansi yang mengimplementasikan pedoman monitoring dan evaluasi pengadaan barang/jasa pemerintah	33	400	
		Terwujudnya pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik menuju satu pasar nasional	- Jumlah layanan pengadaan secara elektronik	500	500	
			- Jumlah LPSE yang memenuhi standar	50	500	
		Terciptanya sistem karir dan pembinaan profesi pengadaan barang/jasa pemerintah.	Persentase pelayanan dalam pengembangan profesi ahli pengadaan barang/jasa pemerintah	10%	100%	
		Terciptanya sistem pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi	Persentase dukungan pelayanan dalam pelatihan kompetensi pengadaan barang/jasa pemerintah	20%	100%	
		Terciptanya sistem jaminan mutu kompetensi melalui penyelenggaraan sertifikasi profesi yang independen dan kredibel	Persentase pelayanan penyelenggaraan ujian sertifikasi keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah	25%	100%	
		Terciptanya kebijakan pengadaan barang/jasa yang transparan, konsisten, efisien dan akuntabel, serta mendukung prinsipprinsip persaingan usaha, dapat meningkatkan peran Usaha Kecil Menengah dan Produk dalam Negeri	Jumlah peraturan perundangan yang dihasilkan dalam pengadaan barang/jasa pemerintah			
			• UU	-	1	^(K)
			• PP	-	3	^(K)
			• Perpres	1	1	^(K)
			• SE/Peraturan Kepala LKPP	-	8	^(K)

KEMENTERIAN/LEMBAGA : LEMBAGA PENGEMBANGAN KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH (LKPP)

NO	PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITYAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
		Terciptanya kebijakan pengadaan badan usaha/swasta dalam kerangka kerjasama pemerintah-swasta	Jumlah peraturan perundangan pengadaan badan usaha/swasta dalam kerangka kerjasama pemerintah-swasta			
			• PP	-	1 ^(K)	
			• Perpres	1	1 ^(K)	
3.1	Penyusunan strategi, kebijakan serta regulasi di bidang pengadaan umum	- Tersedianya strategi, kebijakan dan regulasi di bidang pengadaan umum	Jumlah peraturan perundangan di bidang pengadaan umum:			
			- UU	-	1 ^(K)	
			- PP	-	4 ^(K)	
			- Perpres	2	2 ^(K)	
			- SK Kepala LKPP	3	5 ^(K)	
		- Tersosialisasinya strategi, kebijakan dan regulasi di bidang pengadaan umum	- Jumlah pihak yang mendapatkan sosialisasi	5	25 ^(K)	
3.2	Pengembangan sistem <i>e-procurement</i> nasional	Terfasilitasinya kementerian/ lembaga dan pemerintah daerah dalam penerapan <i>e-procurement</i>	- Jumlah instansi pemerintah yang difasilitasi <i>e-procurement</i>	25	165 ^(K)	
			- Persentase layanan <i>e-procurement</i> yang memenuhi standar	-	95%	
ALOKASI LKPP 2010-2014						813,9

K : Angka kumulatif 5 tahun (2010-2014)

**RENCANA TINDAK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH 2010-2014
PER KEMENTERIAN/LEMBAGA**

KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN SAR NASIONAL

No.	PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
	PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA SERTA PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR BADAN SAR NASIONAL	Meningkatnya dukungan manajemen dan kualitas sarana dan prasarana aparatur dalam rangka pelaksanaan program SAR				1.917,6
1	Kegiatan penyusunan rencana dan program serta kerjasama teknik luar negeri					11,5
2	Kegiatan penyusunan produk hukum dan pengaturan organisasi, tataksana dan kepegawaian					28,0
3	Kegiatan pembinaan administrasi keuangan dan pengelolaan perlengkapan					1.869,1
4	Kegiatan pengembangan sistem informasi serta penyediaan data dan informasi SAR					9,0
	PROGRAM PENGELOLAAN PENCARIAN, PERTOLONGAN DAN PENYELAMATAN	Meningkatnya pengaturan, pengawasan dan pengendalian potensi SAR				2.560,1
1	Kegiatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana SAR					2.241,9
		Optimalnya pengoperasian 7 unit BO-105	paket	1 paket	1 paket	291,2
		Tersedianya Helikopter type medium, 4 unit	unit		4 unit ^{K)}	500,0
		Tersedianya Rubber Boat 104 unit	unit	19	104 unit ^{K)}	20,8
		Tersedianya Rigid Inflatable Boat 50 unit	unit	10	50 unit ^{K)}	100,0
		Tersedianya Rescue Boat type 36, 27 unit	unit	5	27 unit ^{K)}	514,5
		Tersedianya Rescue Boat type 40m, 10 unit	unit		10 unit ^{K)}	418,0
		Tersedianya Hovercraft 12 Unit	unit		12unit ^{K)}	18,0

KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN SAR NASIONAL

No.	PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
		Tersedianya Rescue Truck type 2, 8 unit	unit		8 unit ^{K)}	4,0
		Tersedianya Rescue Car / Rescue Jeep	unit	4	27 unit ^{K)}	25,5
		Tersedianya Rapid Deployment Vehicle 99 unit	unit		99 unit ^{K)}	19,8
		Tersedianya lahan tanah dan dermaga kapal SAR, 5 paket	paket	1 paket	5 paket ^{K)}	87,4
2	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan serta Pemasarakatan SAR	Terselenggaranya Pelatihan, pendidikan dan permasyarakatan SAR 12 Paket	paket	12	60 Paket ^{K)}	18,5
3	Kegiatan Pengelolaan Operasi dan Latihan SAR	Terselenggaranya Operasi dan Latihan SAR	paket	12	65 Paket ^{K)}	281,5
4	Kegiatan Pengelolaan Komunikasi SAR	Terselenggaranya Pengelolaan Komunikasi SAR	paket	11	55 Paket ^{K)}	18,2
TOTAL ALOKASI BASARNAS 2010-2014						4.477,7

K : Angka kumulatif 5 tahun (2010-2014)

**RENCANA TINDAK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH 2010-2014
PER KEMENTERIAN/LEMBAGA**

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KOMISI PENGAWASAN PERSAINGAN USAHA

No	PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
1.	PENGAWASAN PERSAINGAN USAHA	Berjalannya Kegiatan Pengawasan Persaingan Usaha secara efektif dan kredibel dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat	1. Jumlah kegiatan penegakan hukum persaingan usaha	252	305	562,4
			2. Jumlah kegiatan pengembangan dan harmonisasi kebijakan persaingan usaha	67	88	
a.	Penegakan Hukum Persaingan Usaha	Meningkatnya jumlah kegiatan penegakan hukum persaingan usaha sehingga mampu menciptakan kepastian hukum dan iklim usaha yang lebih kondusif	1. Jumlah kegiatan penanganan pelaporan	60	80	70,1
			2. Jumlah kegiatan pemberkasan dan penanganan perkara persaingan usaha	140	160	
			3. Jumlah kegiatan litigasi dan monitoring pelaksanaan putusan KPPU	50	60	
			4. Jumlah kegiatan penilaian dan notifikasi terhadap rencana merger, akuisisi, dan konsolidasi	2	5	
b.	Pengembangan dan harmonisasi Kebijakan Persaingan Usaha	Meningkatnya jumlah kegiatan pengembangan dan harmonisasi kebijakan persaingan usaha yang sehat dalam berbagai kebijakan/ peraturan/regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah guna mendorong efisiensi kinerja perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan rakyat	1. Jumlah kegiatan monitoring pelaku usaha	30	40	47,4
			2. Jumlah kajian sektor industri dan perdagangan	5	6	
			3. Jumlah kegiatan evaluasi kebijakan pemerintah dari perspektif persaingan usaha	16	20	

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KOMISI PENGAWASAN PERSAINGAN USAHA

No	PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2014	
			4. Jumlah saran/ pertimbangan yang disampaikan kepada pemerintah/stakeholder	10	14	
			5. Jumlah perangkat aturan hukum persaingan usaha yang diterbitkan/disahkan	6	32 ^{K)}	
TOTAL ALOKASI KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA 2010-2014						562,4

K : Angka kumulatif 5 tahun (2010-2014)



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2010
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH NASIONAL
(RPJMN)
TAHUN 2010--2014**

**BUKU III
PEMBANGUNAN BERDIMENSI KEWILAYAHAN:
MEMPERKUAT SINERGI PUSAT--DAERAH DAN ANTARDAERAH**

**Diperbanyak Oleh:
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS)
2010**



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

DAFTAR ISI
BUKU III RPJMN TAHUN 2010-2014
PEMBANGUNAN BERDIMENSI KEWILAYAHAN :
MEMPERKUAT SINERGI ANTARA PUSAT-DAERAH DAN ANTARDAERAH

BAB.I ARAH KEBIJAKAN NASIONAL

PENGEMBANGAN WILAYAH 2010-2014

1.1 Pendahuluan	III.1-1
1.2 Kondisi Umum.....	III.1-2
1.2.1 Kesenjangan Antarwilayah	III.1-2
1.2.2 Keterkaitan Antarwilayah.....	III.1-12
1.3 Arah Umum dalam RPJPN 2005-2025	III.1-22
1.4 Arah Pengembangan Wilayah dalam RPJMN 2010-2014	III.1-22
1.5 Strategi Pengembangan Wilayah dalam RPJMN 2010-2014	III.1-17
1.5.1 Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.....	III.1-23
1.5.2 Pengembangan Wilayah Pulau-Pulau Besar	III.1-24
1.5.3 Pengembangan Wilayah Laut	III.1-32
1.5.4 Pengembangan Kawasan.....	III.1-36
1.6 Perkiraan Perkembangan Wilayah	III.1-37
1.7 Sinkronisasi Pusat -Daerah dan Antardaerah dalam Pencapaian Prioritas Nasional	III.1-42
1.8 Sinergi antara Pusat-Daerah dan Antardaerah.....	III.1-47
1.9 Kaidah Pelaksanaan Sinergi Pusat-Daerah dan Antardaerah	III.1-39

BAB.II PENGEMBANGAN WILAYAH SUMATERA TAHUN 2010-2014

2.1 Kondisi Wilayah Sumatera Saat Ini	III.2-1
2.1.1 Capaian Pembangunan Wilayah	III.2-1
2.1.2 Isu Strategis	III.2-13
2.2 Arah Pengembangan Wilayah	III.2-15
2.3 Tujuan dan Sasaran Pengembangan Wilayah.....	III.2-18
2.4 Arah Kebijakan dan Strategi Pengembangan.....	III.2-20

BAB.III PENGEMBANGAN WILAYAH JAWA-BALI TAHUN 2010-2014

3.1 Kondisi Wilayah Jawa-Bali Saat Ini.....	III.3-1
3.1.1 Capaian Pembangunan Wilayah	III.3-1
3.1.2 Isu Strategis	III.3-1
3.2 Permasalahan dan Saran.....	III.3-15
3.3 Tujuan dan Sasaran Pengembangan Wilayah.....	III.3-17

3.4 Arah Kebijakan dan Strategi Pengembangan.....	III.3-19
---------------------------------------------------	----------

BAB.IV PENGEMBANGAN WILAYAH KALIMANTAN TAHUN 2010-2014

4.1 Kondisi Wilayah Kalimantan Saat Ini	III.4-1
4.1.1 Capaian Pembangunan Wilayah	III.4-1
4.1.2 Isu Strategis	III.4-13
4.2 Arah Pengembangan Wilayah	III.4-16
4.3 Tujuan dan Sasaran Pengembangan Wilayah.....	III.4-17
4.4 Arah Kebijakan dan Strategi Pengembangan.....	III.4-19

BAB.V PENGEMBANGAN WILAYAH SULAWESI TAHUN 2010-2014

5.1 Kondisi Wilayah Sulawesi Saat Ini	III.5-1
5.1.1 Capaian pembangunan wilayah.....	III.5-1
5.1.2 Isu Strategis	III.5-13
5.2 Arah Pengembangan Wilayah	III.5-14
5.3 Tujuan dan Sasaran Pengembangan Wilayah.....	III.5-15
5.4 Arah Kebijakan dan Strategi Pengembangan.....	III.5-18

BAB.VI PENGEMBANGAN WILAYAH NUSA TENGGARA TAHUN 2010-2014

6.1 Kondisi Wilayah Nusa Tenggara Saat Ini	III.6-1
6.1.1 Capaian pembangunan wilayah.....	III.6-1
6.1.2 Isu Strategis	III.6-13
6.2 Arah Pengembangan Wilayah	III.6-14
6.3 Tujuan dan Sasaran Pengembangan Wilayah.....	III.6-15
6.4 Arah Kebijakan dan Strategi Pengembangan.....	III.6-18

BAB.VII PENGEMBANGAN WILAYAH MALUKU TAHUN 2010-2014

7.1 Kondisi Wilayah Maluku Saat Ini.....	III.7-1
7.1.1 Capaian pembangunan wilayah.....	III.7-1
7.1.2 Isu Strategis	III.7-13
7.2 Arah Pengembangan Wilayah	III.7-14
7.3 Tujuan dan Sasaran Pengembangan Wilayah.....	III.7-15
7.4 Arah Kebijakan dan Strategi Pengembangan.....	III.7-17



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

BAB.VIII PENGEMBANGAN WILAYAH PAPUA TAHUN 2010-2014

8.1 Kondisi Wilayah Papua Saat Ini.....	III.8-1
8.1.1 Capaian pembangunan wilayah.....	III.8-1
8.1.2 Isu Strategis	III.8-14
8.2 Arah Pengembangan Wilayah	III.8-16
8.3 Tujuan dan Sasaran Pengembangan Wilayah.....	III.8-17
8.4 Arah Kebijakan dan Strategi Pengembangan.....	III.8-19

DAFTAR TABEL
BUKU III RPJMN TAHUN 2010-2014
PEMBANGUNAN BERDIMENSI KEWILAYAHAN :
MEMPERKUAT SINERGI PUSAT-DAERAH DAN ANTARDAERAH

Tabel 1.1	Persebaran Penduduk Antarwilayah Tahun 2009.....	III.1-2
Tabel 1.2	Persentase Pengangguran Terbuka Tahun 2004-2009	III.1-3
Tabel 1.3	Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Perdesaan dan Perkotaan Menurut Wilayah Tahun 2008	III.1-4
Tabel 1.4	Kondisi Jalan Nasional Pada Tahun 2006 dan 2007	III.1-10
Tabel 1.5	Struktur Perekonomian, Pertumbuhan dan Serapan Tenaga kerja Menurut Provinsi Tahun 2005-2008.....	III.1-17
Tabel 1.6	Sasaran Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran dan Kemiskinan Wilayah Tahun 2010-2014 (Dalam Persen).....	III.1-38
Tabel 1.7	Sasaran Angka Kematian Bayi, Rata-Rata Lama Sekolah dan Angka Harapan Hidup Tahun 2010-2014.....	III.1-40
Tabel 2.1	Pertumbuhan Ekonomi Wilayah Sumatera Tahun 2004-2008 Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000 (Dalam Persen).....	III.2-1
Tabel 2.2	PDRB Perkapita Dengan Migas Wilayah Sumatera Tahun 2004-2008 Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000 (Dalam Ribu Rupiah)	III.2-4
Tabel 2.3	Persentase Kemiskinan Wilayah Sumatera Tahun 2007-2009.....	III.2-6
Tabel 2.4	Sasaran Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan dan Pengangguran di Wilayah Sumatera Tahun 2010-2014	III.2-19
Tabel 2.5	Sasaran Angka Kematian Bayi, Angka Harapan Hidup, Rata-Rata Lama Sekolah dan Pendapatan Perkapita di Wilayah Sumatera Tahun 2010-2014	III.2-20
Tabel 3.1	Pertumbuhan Ekonomi Wilayah Jawa Bali Tahun 2004-2008 Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000 (Dalam Persen).....	III.3-1
Tabel 3.2	PDRB Perkapita Dengan Migas Wilayah Jawa-Bali Tahun 2004-2008 Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000 (Dalam Ribu Rupiah)	III.3-4
Tabel 3.3	Persentase Kemiskinan Wilayah Jawa Bali Tahun 2007-2009	III.3-5
Tabel 3.4	Sasaran Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan dan Pengangguran di Wilayah Jawa Bali Tahun 2010-2014	III.3-18
Tabel 3.5	Sasaran Angka Kematian Bayi, Angka Harapan Hidup, Rata-Rata Lama Sekolah dan Pendapatan Perkapita di Wilayah Jawa Bali Tahun 2010-2014	III.3-19
Tabel 4.1	Pertumbuhan Ekonomi Wilayah Kalimantan Tahun 2004-2008	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

	Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000 (Dalam Persen).....	III.4-1
Tabel 4.2	PDRB Perkapita Dengan Migas Wilayah Kalimantan Tahun 2004-2008 Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000 (Dalam Ribu Rupiah)	III.4-4
Tabel 4.3	Persentase Kemiskinan Wilayah Kalimantan Tahun 2007-2009....	III.4-6
Tabel 4.4	Sasaran Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan dan Pengangguran di Wilayah Kalimantan Tahun 2010-2014	III.4-18
Tabel 4.5	Sasaran Angka Kematian Bayi, Angka Harapan Hidup, Rata-Rata Lama Sekolah dan Pendapatan Perkapita di Wilayah Kalimantan Tahun 2010-2014	III.4-19
Tabel 5.1	Pertumbuhan Ekonomi Wilayah Sulawesi Tahun 2004-2008 Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000 (Dalam Persen).....	III.5-1
Tabel 5.2	PDRB Perkapita Dengan Migas Wilayah Sulawesi Tahun 2004-2008 Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000 (Dalam Ribu Rupiah)	III.5-4
Tabel 5.3	Persentase Kemiskinan Wilayah Sulawesi Tahun 2007-2009	III.5-5
Tabel 5.4	Sasaran Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan dan Pengangguran di Wilayah Sulawesi Tahun 2010-2014.....	III.5-17
Tabel 5.5	Sasaran Angka Kematian Bayi, Angka Harapan Hidup, Rata-Rata Lama Sekolah dan Pendapatan Perkapita di Wilayah Sulawesi Tahun 2010-2014.....	III.5-18
Tabel 6.1	Pertumbuhan Ekonomi Wilayah Nusa Tenggara Tahun 2004-2008 Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000 (Dalam Persen).....	III.6-1
Tabel 6.2	PDRB Perkapita Dengan Migas Wilayah Nusa Tenggara Tahun 2004-2008 Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000 (Dalam Ribu Rupiah).....	III.6-4
Tabel 6.3	Persentase Kemiskinan Wilayah Nusa Tenggara Tahun 2007-2009	III.6-6
Tabel 6.4	Sasaran Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan dan Pengangguran di Wilayah Nusa Tenggara Tahun 2010-2014	III.6-17
Tabel 6.5	Sasaran Angka Kematian Bayi, Angka Harapan Hidup, Rata-Rata Lama Sekolah dan Pendapatan Perkapita di Wilayah Nusa Tenggara Tahun 2010-2014	III.6-17
Tabel 7.1	Pertumbuhan Ekonomi Wilayah Maluku Tahun 2004-2008 Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000 (Dalam Persen).....	III.7-1
Tabel 7.2	PDRB Perkapita Dengan Migas Wilayah Maluku Tahun 2004-2008 Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000 (Dalam Ribu Rupiah)	III.7-4

Tabel 7.3	Persentase Kemiskinan Wilayah Maluku Tahun 2007-2009	III.7-5
Tabel 7.4	Sasaran Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan dan Pengangguran di Wilayah Maluku Tahun 2010-2014.....	III.7-16
Tabel 7.5	Sasaran Angka Kematian Bayi, Angka Harapan Hidup, Rata-Rata Lama Sekolah dan Pendapatan Perkapita di Wilayah Maluku Tahun 2010-2014.....	III.7-16
Tabel 8.1	Pertumbuhan Ekonomi Wilayah Papua Tahun 2004-2008 Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000 (Dalam Persen)	III.3-1
Tabel 8.2	PDRB Perkapita Dengan Migas Wilayah Papua Tahun 2004-2008 Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000 (Dalam Ribu Rupiah).....	III.3-4
Tabel 8.3	Persentase Kemiskinan Wilayah Papua Tahun 2007-2009.....	III.3-6
Tabel 8.4	Sasaran Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan dan Pengangguran di Wilayah Papua Tahun 2010-2014.....	III.3-18
Tabel 8.5	Sasaran Angka Kematian Bayi, Angka Harapan Hidup, Rata-Rata Lama Sekolah dan Pendapatan Perkapita di Wilayah Papua Tahun 2010-2014.....	III.3-18

DAFTAR GAMBAR
BUKU III RPJMN TAHUN 2010-2014
PEMBANGUNAN BERDIMENSI KEWILAYAHAN :
MEMPERKUAT SINERGI PUSAT-DAERAH DAN ANTARDAERAH

Gambar 1.1	Umur Harapan Hidup Pada Tahun 2005-2008 Per Provinsi	III.1-5
Gambar 1.2	Angka Partisipasi Murni Sekolah Menengah Pertama Tahun 2004-2008 ..	III.1-6
Gambar 1.3	Sumbangan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Wilayah Tahun 2006-2008.....	III.1-7
Gambar 1.4	PDRB Perkapita Dengan Migas Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000 Menurut Provinsi Tahun 2004-2008	III.1-7
Gambar 1.5	Realisasi Investasi PMDN dan PMA Menurut Wilayah Tahun 2008.....	III.1-8
Gambar 1.6	Kapasitas Jalan dan Kerapatan Jalan Per Provinsi Tahun 2005.....	III.1-9
Gambar 1.7	Peta Lokasi Daerah Tertinggal di Indonesia Tahun 2007	III.1-8
Gambar 1.8	Peta Lokasi Daerah Perbatasan di Indonesia Tahun 2007	III.1-12
Gambar 1.9	Aliran Input Produksi Antarwilayah (Dalam Persen Terhadap Total Input Nasional)	III.1-14
Gambar 1.10	Aliran Output Produksi Antarwilayah (Dalam Persen Terhadap Total Output Nasional)	III.1-15
Gambar 2.1	Kontribusi Ekonomi Wilayah Sumatera Menurut Sektor Atas Dasar Harga Berlaku Triwulan I Tahun 2008.....	III.2-2
Gambar 2.2	Kontribusi Ekonomi Wilayah Sumatera Terhadap Ekonomi Nasional Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2008	III.2-3
Gambar 2.3	Jumlah Pengangguran Wilayah Sumatera Tahun 2006-2008	III.2-5
Gambar 2.4	Indeks Pembangunan Manusia Wilayah Sumatera Tahun 2007-2008	III.2-7
Gambar 2.5	Umur harapan Hidup Wilayah Sumatera Tahun 2007-2008.....	III.2-6
Gambar 2.6	Rata-rata Lama Sekolah Wilayah Sumatera Tahun 2007-2008.....	III.2-9
Gambar 2.7	Perkembangan Indeks Pembangunan Gender Wilayah Sumatera Tahun 2004-2007	III.2-10
Gambar 2.8	Perkembangan Indeks Pemberdayaan Gender Wilayah Sumatera Tahun 2004-2007	III.2-11
Gambar 2.9	Daerah Perbatasan di Wilayah Sumatera	III.2-13
Gambar 3.1	Kontribusi Ekonomi Wilayah Jawa-Bali Menurut Sektor Atas Dasar Harga Berlaku Triwulan I Tahun 2008.....	III.3-2
Gambar 3.2	Kontribusi Ekonomi Wilayah Jawa Bali Terhadap Ekonomi Nasional Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2008.....	III.3-3
Gambar 3.3	Jumlah Pengangguran Wilayah Jawa Bali Tahun 2006-2008	III.3-5
Gambar 3.4	Indeks Pembangunan Manusia Wilayah Jawa Bali Tahun 2007-2008	III.3-6
Gambar 3.5	Umur harapan Hidup Wilayah Jawa Bali Tahun 2007-2008.....	III.3-7

Gambar 3.6	Rata-rata Lama Sekolah Wilayah Jawa Bali Tahun 2007-2008	III.3-8
Gambar 3.7	Perkembangan Indeks Pembangunan Gender Wilayah Jawa Bali Tahun 2004-2007	III.3-9
Gambar 3.8	Perkembangan Indeks Pemberdayaan Gender Wilayah Jawa Bali Tahun 2004-2007.....	III.3-10
Gambar 3.9	Peta Potensi Rawan Bencana Alam dan Daerah Tertinggal Wilayah Jawa Bali	III.3-11
Gambar 4.1	Kontribusi Ekonomi Wilayah Kalimantan Menurut Sektor Atas Dasar Harga Berlaku Triwulan I Tahun 2008	III.4-2
Gambar 4.2	Kontribusi Ekonomi Wilayah Kalimantan Terhadap Ekonomi Nasional Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2008	III.4-3
Gambar 4.3	Jumlah Pengangguran Wilayah Kalimantan Tahun 2006-2008	III.4-5
Gambar 4.4	Indeks Pembangunan Manusia Wilayah Kalimantan Tahun 2007-2008	III.4-5
Gambar 4.5	Umur Harapan Hidup Wilayah Kalimantan Tahun 2007-2008	III.4-8
Gambar 4.6	Rata-rata Lama Sekolah Wilayah Kalimantan Tahun 2007-2008.....	III.4-9
Gambar 4.7	Perkembangan Indeks Pembangunan Gender Wilayah Kalimantan Tahun 2004-2007	III.4-10
Gambar 4.8	Perkembangan Indeks Pemberdayaan Gender Wilayah Kalimantan Tahun 2004-2007	III.4-11
Gambar 4.9	Peta Kawasan Perbatasan di Wilayah Kalimantan	III.4-13
Gambar 5.1	Kontribusi Ekonomi Wilayah Sulawesi Menurut Sektor Atas Dasar Harga Berlaku Triwulan I Tahun 2008.....	III.5-2
Gambar 5.2	Kontribusi Ekonomi Wilayah Sulawesi Terhadap Ekonomi Nasional Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2008.....	III.5-3
Gambar 5.3	Jumlah Pengangguran Wilayah Sulawesi Tahun 2006-2008.....	III.5-5
Gambar 5.4	Indeks Pembangunan Manusia Wilayah Sulawesi Tahun 2007-2008.....	III.5-5
Gambar 5.5	Umur harapan Hidup Wilayah Sulawesi Tahun 2007-2008	III.5-7
Gambar 5.6	Rata-rata Lama Sekolah Wilayah Sulawesi Tahun 2007-2008	III.5-8
Gambar 5.7	Perkembangan Indeks Pembangunan Gender Wilayah Sulawesi Tahun 2004-2007	III.5-9
Gambar 5.8	Perkembangan Indeks Pembangunan Gender Wilayah Sulawesi Tahun 2004-2007	III.5-10
Gambar 5.9	Peta Kawasan Perbatasan di Wilayah Sulawesi.....	III.5-12
Gambar 6.1	Kontribusi Ekonomi Wilayah Nusa Tenggara Menurut Sektor Atas Dasar Harga Berlaku Triwulan I Tahun 2008	III.6-2
Gambar 6.2	Kontribusi Ekonomi Wilayah Nusa Tenggara Terhadap Ekonomi Nasional Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2008.....	III.6-3
Gambar 6.3	Jumlah Pengangguran Wilayah Nusa Tenggara Tahun 2006-2008	III.6-5



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Gambar 6.4	Indeks Pembangunan Manusia Wilayah Nusa Tenggara Tahun 2007-2008.....	III.6-7
Gambar 6.5	Umur harapan Hidup Wilayah Nusa Tenggara Tahun 2007-2008.....	III.6-8
Gambar 6.6	Rata-rata Lama Sekolah Wilayah Nusa Tenggara Tahun 2007-2008	III.6-9
Gambar 6.7	Perkembangan Indeks Pembangunan Gender Wilayah Nusa Tenggara Tahun 2004-2007.....	III.6-10
Gambar 6.8	Perkembangan Indeks Pemberdayaan Gender Wilayah Nusa Tenggara Tahun 2004-2007.....	III.6-11
Gambar 6.9	Daerah Tertinggal di Wilayah Nusa Tenggara.....	III.6-12
Gambar 6.10	Daerah Perbatasan di Wilayah Nusa Tenggara	III.6-10
Gambar 7.1	Kontribusi Ekonomi Wilayah Maluku Menurut Sektor Atas Dasar Harga Berlaku Triwulan I Tahun 2008	III.7-2
Gambar 7.2	Kontribusi Ekonomi Wilayah Maluku Terhadap Ekonomi Nasional Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2008.....	III.7-3
Gambar 7.3	Jumlah Pengangguran Wilayah Maluku Tahun 2006-2008.....	III.7-5
Gambar 7.4	Indeks Pembangunan Manusia Wilayah Maluku Tahun 2007-2008.....	III.7-6
Gambar 7.5	Umur harapan Hidup Wilayah Maluku Tahun 2007-2008	III.7-7
Gambar 7.6	Rata-rata Lama Sekolah Wilayah Maluku Tahun 2007-2008.....	III.7-8
Gambar 7.7	Perkembangan Indeks Pembangunan Gender Wilayah Maluku Tahun 2004-2007.....	III.7-9
Gambar 7.8	Perkembangan Indeks Pemberdayaan Gender Wilayah Maluku Tahun 2004-2007.....	III.7-9
Gambar 7.9	Daerah Tertinggal di Wilayah Maluku	III.7-9
Gambar 8.1	Kontribusi Ekonomi Wilayah Papua Menurut Sektor Atas Dasar Harga Berlaku Triwulan I Tahun 2008	III.3-2
Gambar 8.2	Kontribusi Ekonomi Wilayah Papua Terhadap Ekonomi Nasional Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2008.....	III.3-3
Gambar 8.3	Jumlah Pengangguran Wilayah Papua Tahun 2006-2008	III.3-5
Gambar 8.4	Indeks Pembangunan Manusia Wilayah Papua Tahun 2007-2008	III.3-7
Gambar 8.5	Umur harapan Hidup Wilayah Papua Tahun 2007-2008.....	III.3-8
Gambar 8.6	Rata-rata Lama Sekolah Wilayah Papua Tahun 2007-2008.....	III.3-9
Gambar 8.7	Perkembangan Indeks Pembangunan Gender Wilayah Papua Tahun 2004-2007.....	III.3-10
Gambar 8.8	Perkembangan Indeks Pemberdayaan Gender Wilayah Papua Tahun 2004-2007.....	III.3-11
Gambar 8.9	Peta Kawasan Perbatasan di Wilayah Papua	III.3-14



BAB I

ARAH KEBIJAKAN NASIONAL PENGEMBANGAN WILAYAH TAHUN 2010-2014

1.1 Pendahuluan

Pelaksanaan pembangunan selama ini telah mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan di berbagai daerah. Namun, perbedaan kondisi geografis, sumber daya alam, infrastruktur, sosial budaya dan kapasitas sumber daya manusia menyebabkan masih adanya kesenjangan antarwilayah. Akibatnya, kesejahteraan masyarakat tidak selalu sama dan merata di seluruh wilayah. Kemajuan pembangunan di Jawa-Bali dan Sumatera relatif lebih cepat dibanding wilayah lainnya.

Masyarakat di wilayah Papua, Maluku, Nusa Tenggara, Sulawesi dan Kalimantan terutama masyarakat yang tinggal di kawasan perbatasan, perdesaan, daerah pedalaman, daerah tertinggal dan pulau terdepan masih menghadapi permasalahan dalam pemenuhan hak-hak dasar rakyat termasuk pangan dan gizi, layanan kesehatan dan pendidikan, pengurangan pengangguran dan kemiskinan, penyediaan air bersih dan sanitasi, pengelolaan tanah, sumber daya alam dan lingkungan, pembalakan hutan dan pencurian ikan, kerusakan lingkungan, percepatan pembangunan jaringan prasarana dan sarana, serta perluasan akses informasi dan partisipasi dalam pembangunan. Masalah lain yang dihadapi adalah belum memadainya jaringan prasarana penunjang keterkaitan ekonomi wilayah, terbatasnya investasi, terpusatnya penguasaan aset, dan kurang kuatnya kelembagaan ekonomi lokal. Permasalahan tersebut menyebabkan belum optimalnya pemanfaatan keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif, terutama pengelolaan sumber daya agraris dan maritim sebagai basis ekonomi wilayah dan dasar keunggulan daya saing nasional.

Pemecahan berbagai masalah di daerah tersebut memerlukan suatu kebijakan, program dan kegiatan yang konsisten, terpadu dan bersifat lintas sektor, dengan mempertimbangkan kesesuaian tata ruang wilayah, sistem hukum dan kelembagaan yang andal; serta koordinasi dan kerjasama yang solid antara kementerian/lembaga dan satuan kerja perangkat daerah dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi berbagai kebijakan, program dan kegiatan pembangunan. Pemecahan berbagai masalah di daerah juga menjadi bagian integral dari pelaksanaan agenda pembangunan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014.

Buku III RPJMN 2010-2014 Pembangunan Berdimensi Kewilayahan: Memperkuat Sinergi Pusat-Daerah dan Antardaerah ini memuat arah kebijakan,

program dan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah melalui kementerian/lembaga dan satuan kerja perangkat daerah di setiap wilayah. Pengembangan wilayah didasarkan pada pembagian 7 (tujuh) wilayah, yaitu: Sumatera, Jawa-Bali, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua, yang merujuk pada pembagian wilayah dalam Rencana Tata Ruang Pulau.

1.2 Kondisi Umum

1.2.1 Kesenjangan Antarwilayah

Sebagian besar penduduk terpusat di wilayah Jawa Bali, yaitu sekitar 60 persen dengan luas wilayah hanya sekitar 7 persen dari total wilayah nasional. Sementara jumlah penduduk di Papua hanya sekitar 2 persen dengan luas wilayah sekitar 22 persen dari total nasional. Sebaran penduduk menunjukkan tingkat kepadatan penduduk terpusat di kota-kota besar dengan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. Jumlah penduduk di perkotaan diperkirakan mencapai sekitar 56 persen pada tahun 2015 dan sekitar 65 persen pada tahun 2025. Tantangan dalam lima tahun mendatang adalah mendorong persebaran penduduk secara seimbang dan merata ke seluruh wilayah.

TABEL 1.1
PERSEBARAN PENDUDUK ANTARWILAYAH TAHUN 2009

Wilayah	Jumlah (Ribuan Jiwa)	Persentase	Kepadatan (jiwa/km ²)
Sumatera	49.615,4	21,4	103,2
Jawa-Bali	137.711,1	59,5	1.018,4
Kalimantan	13.065,8	5,6	24,0
Sulawesi	16.767,7	7,2	88,9
Nusa Tenggara	9.053,7	3,9	134,5
Maluku	2.314,5	1,0	29,3
Papua	2.841,4	1,2	6,8
Nasional	231.369,6	100,0	121,1

Sumber : Proyeksi Penduduk Indonesia per Provinsi 2005-2015, BPS

Dengan memusatnya penduduk di wilayah Jawa Bali dan Sumatera, jumlah angkatan kerja tertinggi berada di wilayah Sumatera dan Jawa-Bali, sedangkan jumlah

angkatan kerja terendah di wilayah Maluku dan Papua. Sementara, tingkat pengangguran tertinggi terdapat di wilayah Maluku dan Jawa Bali sebesar 8,8 persen. Di luar wilayah Maluku dan Jawa Bali, tingkat pengangguran tertinggi terdapat di Sumatera sebesar 7,7 persen, Sulawesi sebesar 7,5 persen dan Kalimantan sebesar 7,0 persen (**Tabel 1.2**). Tantangan dalam lima tahun mendatang adalah menciptakan kesempatan kerja dengan mengembangkan kegiatan-kegiatan baru di wilayah Jawa-Bali dan membangun pusat-pusat pertumbuhan baru di wilayah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua.

TABEL 1.2
PERSENTASE PENGANGGURAN TERBUKA TAHUN 2004-2009

Wilayah	Tahun 2004	Tahun 2005	Tahun 2006	Tahun 2007	Tahun 2008	Tahun 2009
Sumatera	10,0	10,1	11,9	9,6	9,1	7,7
Jawa-Bali	10,0	10,6	10,4	10,2	8,8	8,8
Kalimantan	12,7	12,0	10,7	9,9	9,1	7,5
Sulawesi	6,0	7,1	6,9	5,8	4,4	4,3
Nusa Tenggara	7,5	7,4	8,3	7,9	7,3	7,0
Maluku	9,9	10,8	12,5	11,8	9,3	8,8
Papua	8,0	7,1	6,0	6,6	5,9	5,0
Nasional	9,9	10,3	10,4	9,8	8,6	8,1

Sumber: Sakernas, Februari, BPS

Jumlah penduduk miskin di Indonesia tahun 2008 adalah 34,96 juta jiwa atau 15,4 persen dari seluruh penduduk Indonesia. Dari jumlah tersebut, 22,19 juta jiwa penduduk miskin tinggal di daerah perdesaan dan sisanya 12,77 juta jiwa di daerah perkotaan. Wilayah Jawa Bali memiliki jumlah penduduk miskin tertinggi baik di daerah perkotaan maupun perdesaan. Berdasarkan persentase penduduk miskin, Papua merupakan wilayah dengan angka kemiskinan tertinggi, yaitu sebesar 36,1 persen. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa, secara absolut, jumlah penduduk miskin sebagian besar tinggal di wilayah Jawa Bali, yaitu hampir 50 persen penduduk miskin, namun persentase kemiskinan di luar wilayah Jawa-Bali jauh lebih tinggi sebagai akibat sulitnya akses masyarakat terhadap pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan, air bersih, dan terbatasnya peluang pengembangan kegiatan.

TABEL 1.3
JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK MISKIN DI PERDESAAN DAN PERKOTAAN
MENURUT WILAYAH TAHUN 2008

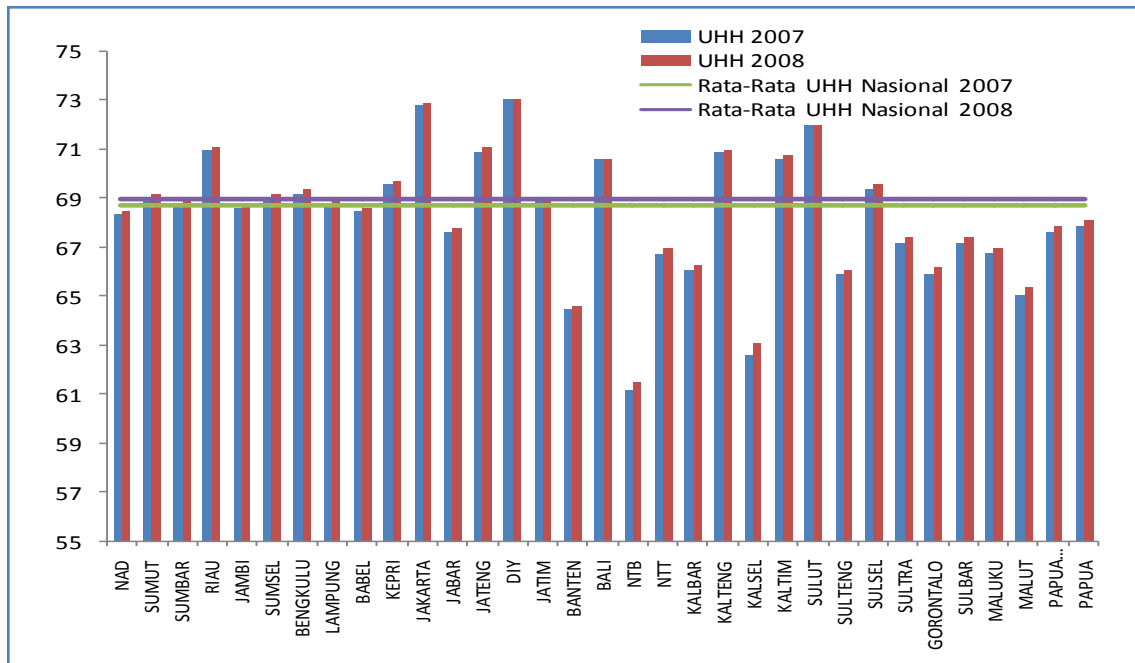
Wilayah	Jumlah Penduduk Miskin (Juta Jiwa)			Persentase Penduduk Miskin (%)		
	Kota	Desa	Kota+Desa	Kota	Desa	Kota+Desa
Sumatera	2,6	4,7	7,3	13,5	14,8	14,4
Jawa-Bali	8,7	11,5	20,2	10,2	17,3	12,5
Kalimantan	0,4	0,8	1,2	6,9	11,0	8,9
Sulawesi	0,4	2,2	2,6	9,1	20,9	17,6
Nusa Tenggara	0,7	1,5	2,2	22,5	23,8	24,7
Maluku	0,1	0,4	0,5	8,1	25,1	20,5
Papua	0,0	0,9	1,0	6,5	44,9	36,1
Nasional	12,8	22,2	35,0	11,0	19,0	16,2

Sumber : Badan Pusat Statistik

Perkembangan Umur Harapan Hidup (UHH) secara nasional menunjukkan peningkatan dari 68,7 tahun pada tahun 2007 menjadi 69 tahun pada tahun 2008. Hampir setengah dari seluruh provinsi memiliki UHH lebih rendah dari UHH nasional terutama provinsi yang berada di kawasan timur Indonesia. Kondisi ini menunjukkan bahwa akses terhadap pelayanan kesehatan di kawasan timur Indonesia masih cukup rendah dibanding dengan kawasan barat Indonesia (**Gambar 1.1**).

GAMBAR 1.1

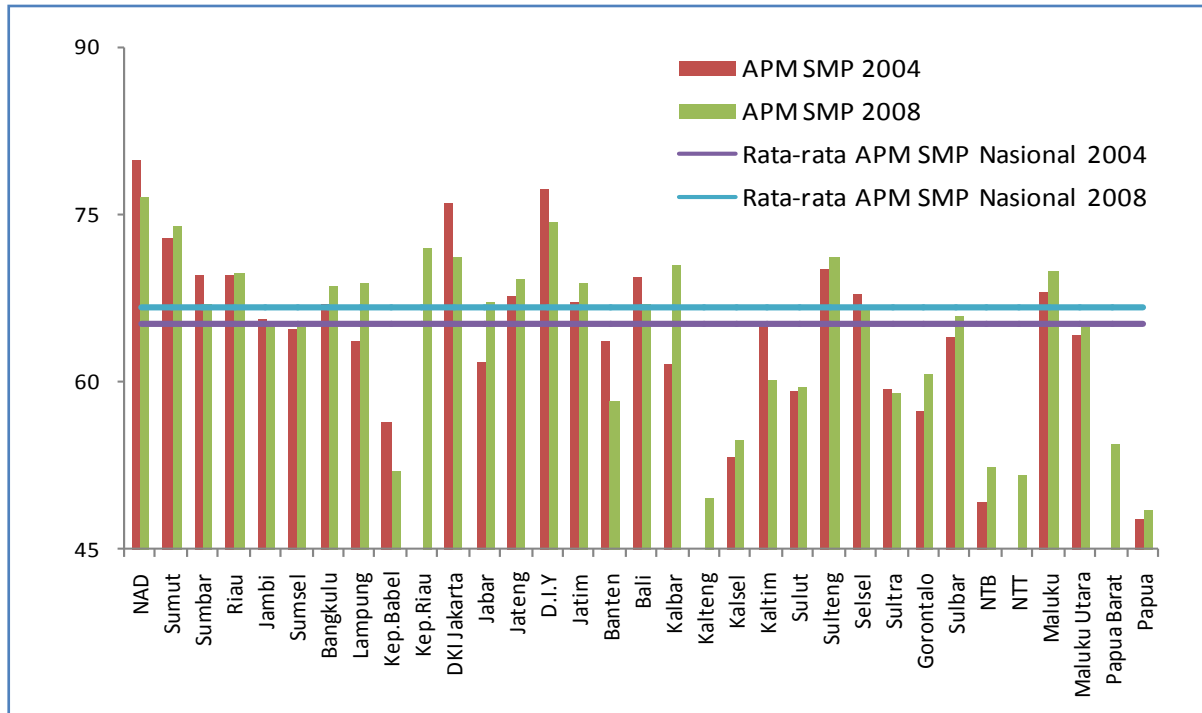
UMUR HARAPAN HIDUP PADA TAHUN 2005-2008 PER PROVINSI



Sumber :Badan Pusat Statistik (diolah)

Angka Partisipasi Murni (APM) Sekolah Menengah Pertama (SMP) masih menunjukkan kesenjangan antarwilayah. Sekitar 50 persen provinsi memiliki APM SMP lebih rendah dari rata-rata nasional yang disebabkan antara lain oleh terbatasnya akses pendidikan terutama di daerah-daerah terpencil dan rendahnya ketersediaan tenaga pengajar di sebagian besar di kawasan timur Indonesia.

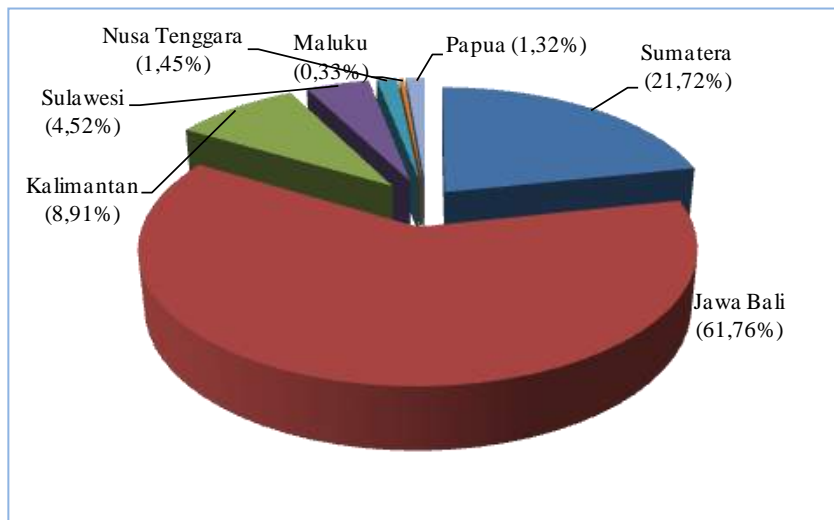
GAMBAR 1.2
ANGKA PARTISIPASI MURNI SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
TAHUN 2004-2008



Sumber : Departemen Pendidikan Nasional

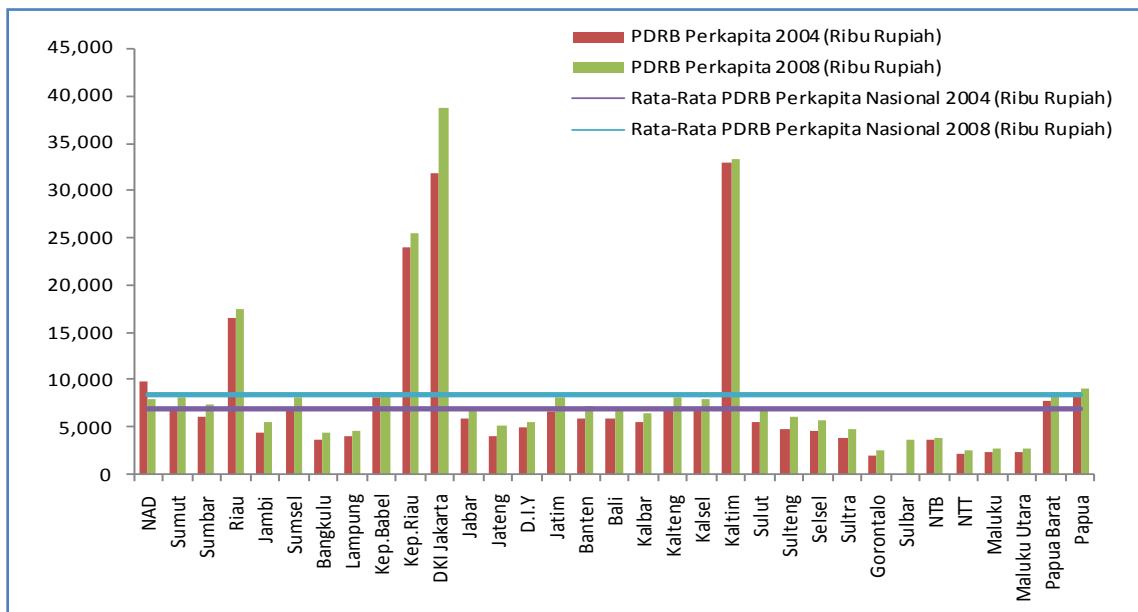
Kesenjangan antarwilayah juga ditunjukkan oleh kemampuan produksi. Berdasarkan data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) kuartal 3 tahun 2009, terlihat adanya ketimpangan nilai PDRB antara wilayah Jawa Bali dan wilayah Sumatera dengan wilayah lainnya. Wilayah Jawa Bali masih menjadi pusat kegiatan ekonomi utama dengan sumbangan PDRB rata-rata per tahun lebih dari 60 persen dan wilayah Sumatera lebih dari 20 persen, sementara sumbangan wilayah Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua hanya sekitar 17 persen. PDRB perkapita rata-rata antarwilayah juga menunjukkan perbedaan yang cukup tinggi. Pada tahun 2008, hanya terdapat 5 (lima) provinsi dengan PDRB perkapita diatas rata-rata PDRB perkapita nasional, yaitu: Riau, Kepulauan Riau, DKI Jakarta, Kalimantan Timur dan Papua.

GAMBAR 1.3
SUMBANGAN PDRB ATAS DASAR HARGA BERLAKU
MENURUT WILAYAH TAHUN 2006-2008



Sumber : Badan Pusat Statistik (diolah)

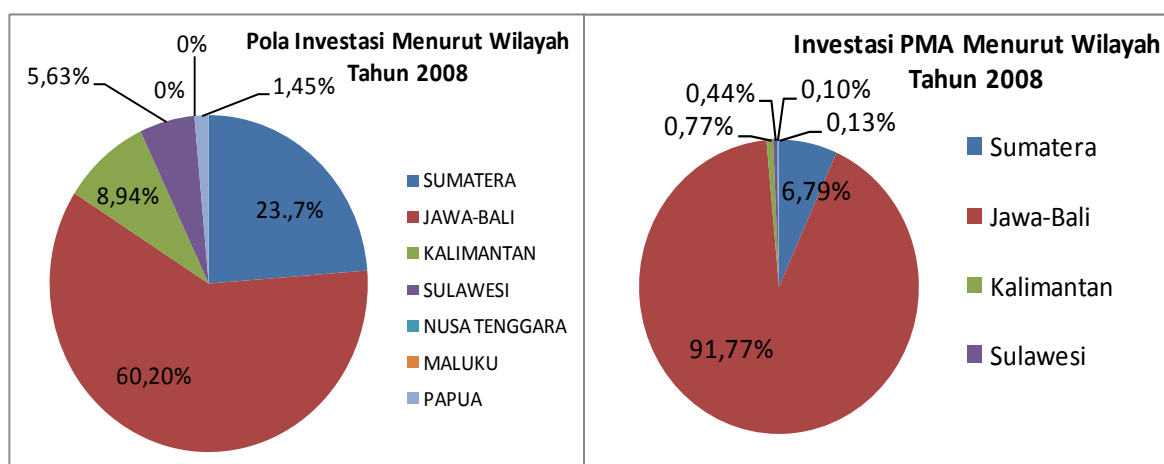
GAMBAR 1.4
PDRB PERKAPITA DENGAN MIGAS ATAS DASAR HARGA KONSTAN TAHUN 2000
MENURUT PROVINSI TAHUN 2004-2008



Sumber : Badan Pusat Statistik (diolah)

Salah satu penyebab kesenjangan antarwilayah adalah persebaran investasi yang kurang merata. Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) pada tahun 2008 terpusat di wilayah Jawa Bali dan Sumatera. Realisasi investasi PMDN di wilayah Jawa Bali sebesar 60,20 persen dan wilayah Sumatera sebesar 23,77 persen dari total realisasi PMDN. Wilayah Jawa Bali juga menjadi pusat Penanaman Modal Asing (PMA). Menurut lokasinya, 91,77 persen dari total nilai realisasi PMA tahun 2008 berada di wilayah Jawa Bali, 6,79 persen di Sumatera dan sisanya tersebar di wilayah Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua. Tantangan yang perlu diatasi dalam lima tahun mendatang adalah mendorong persebaran kegiatan investasi terutama ke wilayah Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua.

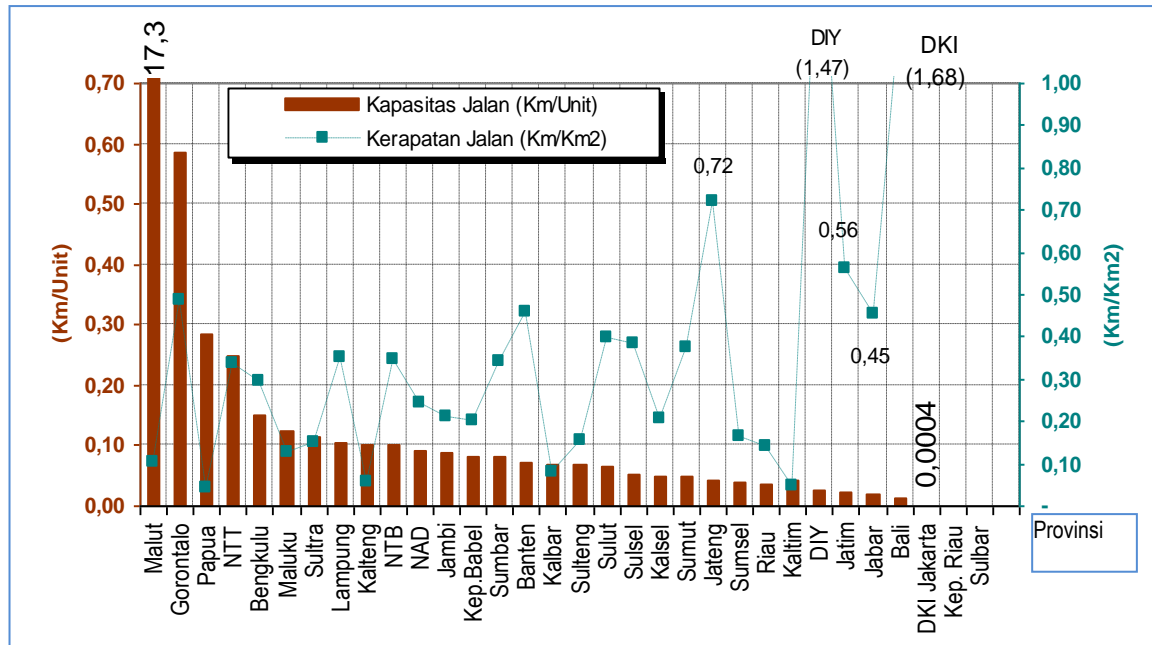
GAMBAR 1.5
REALISASI INVESTASI PMDN DAN PMA MENURUT WILAYAH
TAHUN 2008



Sumber : Badan Koordinasi Penanaman Modal (diolah)

Kesenjangan antarwilayah juga terjadi dalam penyediaan infrastruktur. Wilayah Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua masih menghadapi keterbatasan infrastruktur. Jaringan irigasi terluas masih terdapat di wilayah Jawa Bali, yaitu Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Sementara daerah irigasi terluas di luar wilayah Jawa berada di Provinsi Sumatera Selatan, Lampung dan Sumatera Barat. Dari ketersediaan prasarana jalan, rasio panjang jalan dan luas wilayah yang menunjukkan tingkat kepadatan jalan tertinggi terdapat di wilayah Jawa Bali, sementara kepadatan jalan terendah di wilayah Papua dan Kalimantan. Tantangan dalam lima mendatang adalah mempercepat penyediaan infrastruktur di Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara dan Papua.

GAMBAR 1.6
KAPASITAS JALAN DAN KERAPATAN JALAN PER PROVINSI TAHUN 2005



Sumber : Departemen Pekerjaan Umum (diolah)

Pada tahun 2006 dan 2007, jalan dengan kondisi rusak ringan meningkat sepanjang 860,9 km (2,5 persen), dan kondisi jalan rusak berat berkurang sepanjang 1.649,4 km (4,8 persen). Meningkatnya kondisi jalan rusak ringan pada periode 2006-2007 tersebar di wilayah Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua. Pada tahun 2007, jalan rusak berat sebagian besar berada di wilayah Maluku, Papua dan Kalimantan. Berdasarkan perbandingan kondisi jalan provinsi, tiga provinsi yang memiliki kondisi jalan rusak berat tertinggi adalah Kalimantan Tengah, Gorontalo, dan NAD. Tantangan yang dihadapi dalam lima tahun mendatang tidak hanya terbatasnya pembangunan jalan, tetapi juga belum optimalnya pemeliharaan jalan.

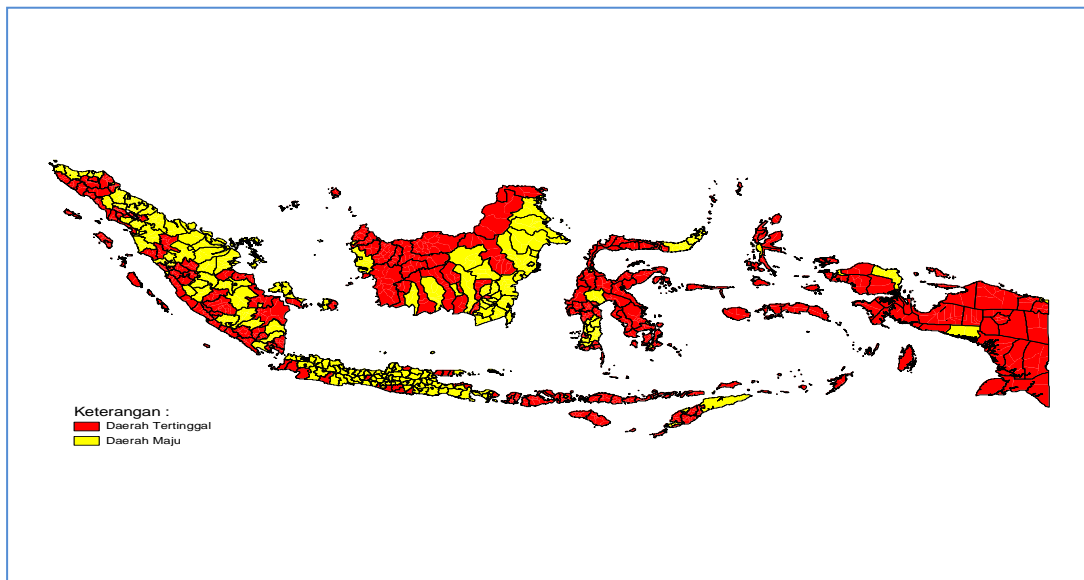
TABEL 1.4
KONDISI JALAN NASIONAL PADA TAHUN 2006 DAN 2007

Wilayah	Panjang Jalan (km)				Persentase Panjang Jalan (%)			
	Rusak Ringan		Rusak Berat		Rusak Ringan		Rusak Berat	
	2006	2007	2006	2007	2006	2007	2006	2007
Sumatera	734,6	302,2	501,4	218,5	6,9	2,9	4,7	2,1
Jawa	237,8	99,7	82,2	55,3	4,8	2,0	1,6	1,1
Bali dan Nustra	298,1	160,2	46,2	0,8	12,5	6,7	1,9	0,0
Kalimantan	541,9	1.382,4	1.393,2	690,5	9,5	24,2	24,4	12,1
Sulawesi	610,5	764,3	658,6	634,0	8,6	10,8	9,3	8,9
Maluku	201,0	297,8	417,1	392,9	13,9	20,6	28,9	27,2
Papua	343,6	821,8	1.079,2	536,5	14,9	35,7	46,9	23,3
Total	2.967,6	3.828,5	4.178,0	2.528,6	8,6	11,1	12,1	7,3

Sumber : Subdit Data dan Informasi Direktorat Bina Program, Bina Marga, Dep. PU

Dari segi penyediaan energi, sekitar 81,59 persen pasokan listrik melayani kebutuhan wilayah Jawa Bali, dan 11,6 persen untuk memenuhi kebutuhan wilayah Sumatera. Sementara, pasokan energi listrik untuk wilayah Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua kurang dari 10 persen. Keterbatasan pasokan energi listrik menjadi kendala bagi pengembangan kegiatan ekonomi di hampir semua wilayah. Oleh sebab itu, tantangan dalam lima tahun mendatang adalah mempercepat penyediaan listrik dari berbagai sumber daya terutama wilayah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua.

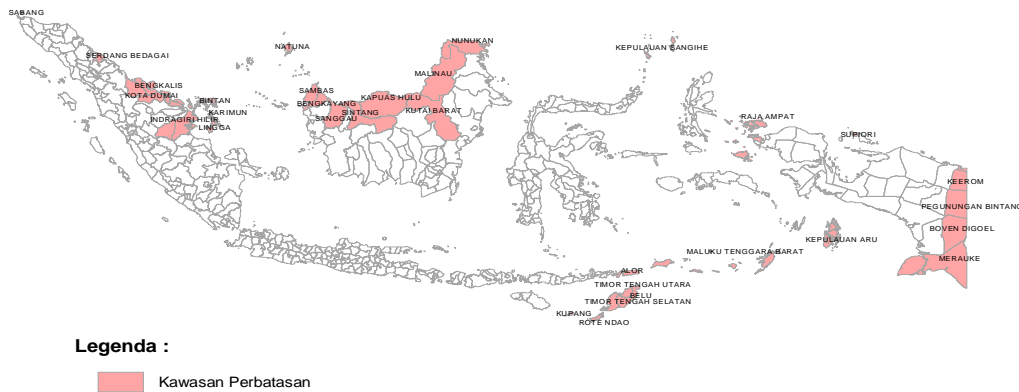
GAMBAR 1.7
PETA LOKASI DAERAH TERTINGGAL DI INDONESIA TAHUN 2007



Sumber : Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal (diolah)

Daerah yang dikategorikan tertinggal sebagian besar terdapat di kawasan timur Indonesia. Permasalahan yang dihadapi di daerah tertinggal antara lain (1) terbatasnya akses transportasi yang menghubungkan daerah tertinggal dan daerah maju; (2) kepadatan penduduk yang relatif rendah dan tersebar; serta (3) miskin sumberdaya alam dan manusia. Oleh karena itu perlu penanganan yang terintegrasi dari semua sektor terkait dan pemerintah daerah untuk mengembangkan wilayah tersebut.

GAMBAR 1.8
PETA LOKASI DAERAH PERBATASAN DI INDONESIA TAHUN 2007



Sumber : Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal (diolah)

Selain daerah tertinggal, beberapa wilayah di Indonesia juga berbatasan langsung dengan negara tetangga. Di bagian utara, wilayah Sumatera dan Kalimantan berbatasan dengan empat negara yaitu Malaysia, Singapura, Thailand dan Vietnam selain itu Wilayah Sulawesi juga berbatasan dengan negara Filipina. Di bagian timur, wilayah Papua berbatasan dengan Negara Papua Nugini dan di bagian selatan wilayah Nusa Tenggara berbatasan langsung dengan Negara Timor Leste. Permasalahan yang muncul di wilayah perbatasan adalah masih tertinggalnya pembangunan di wilayah perbatasan dibanding negara tetangga, serta pandangan tentang daerah perbatasan sebagai halaman belakang sehingga bukan menjadi prioritas pembangunan.

1.2.2 Keterkaitan Antarwilayah

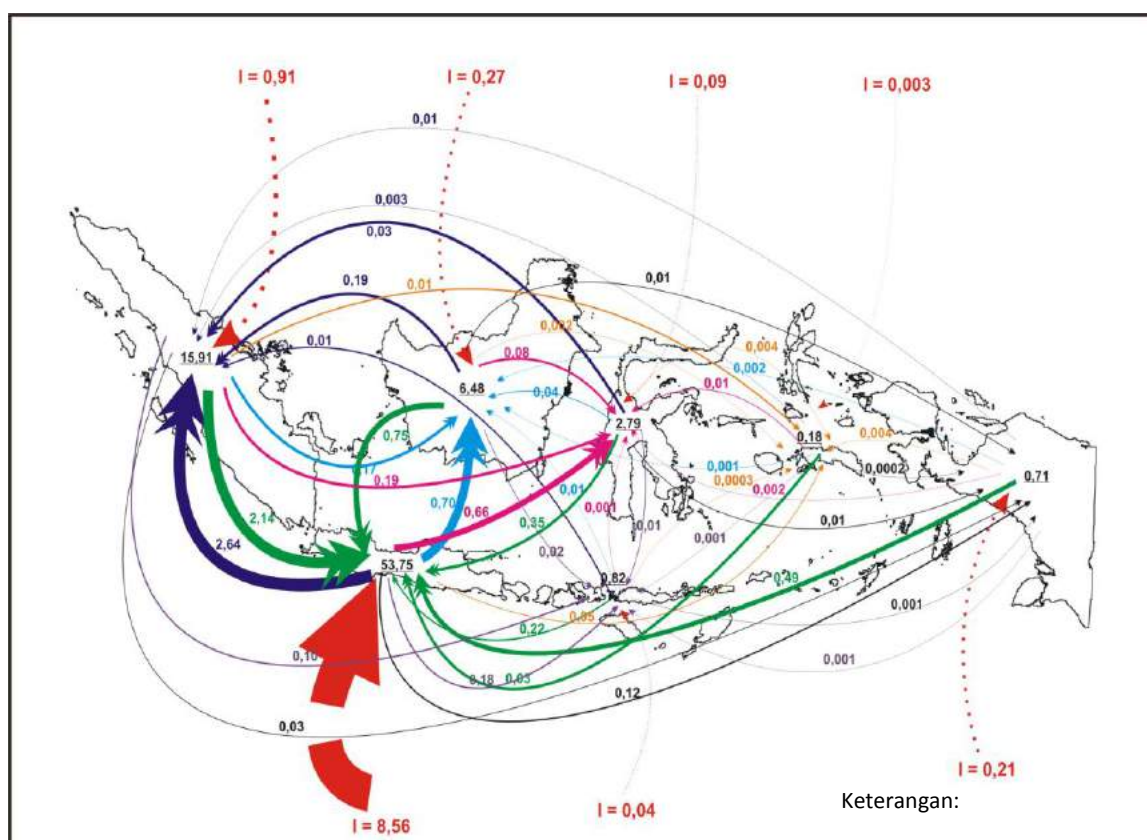
Sebagai negara maritim, keterkaitan antarwilayah yang efisien, kokoh dan terpadu menjadi dasar dari percepatan peningkatan kesejahteraan rakyat dan kemajuan daerah. Keterkaitan antarwilayah akan mendorong perpindahan arus barang dan jasa, modal, dan informasi secara lebih cepat dan produktif. Keterkaitan antarwilayah juga akan mendorong terjaganya kesatuan wilayah sosial, politik, ekonomi, budaya, pertahanan dan keamanan yang solid, serta terbangunnya wawasan kebangsaan yang kuat.



Keterkaitan antarwilayah saat ini masih belum optimal. Berdasarkan data Input Output Antardaerah tahun 2005, perdagangan antarwilayah di Sumatera, Jawa Bali, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua, dan Nusa Tenggara masih sangat terbatas. Arus perdagangan antarwilayah sebagian besar terjadi antara Jawa-Bali dan Sumatera. Sementara, perdagangan wilayah Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua dan Nusa Tenggara sebagian besar hanya terjadi dengan wilayah Jawa Bali. Kondisi ini menyiratkan bahwa keterkaitan ekonomi di kawasan barat Indonesia lebih berkembang dibanding kawasan timur Indonesia.

Bahan baku sebagian besar diperoleh dari masing-masing wilayah (80,65 persen), dari perdagangan antarwilayah mencapai 8,21 persen, dan dari impor mencapai 10,09 persen. Perdagangan bahan baku antara wilayah Jawa-Bali dan Sumatera mencapai 4,78 persen, Jawa-Bali dan Kalimantan mencapai 1,46 persen, Jawa-Bali dan Sulawesi mencapai 1,01 persen, Jawa-Bali dan Maluku mencapai 0,08 persen, Jawa-Bali dan Papua mencapai 0,61 persen, dan Jawa-Bali dan Nusa Tenggara mencapai 0,40 persen. Sementara, perdagangan bahan baku antarwilayah di luar Jawa Bali hanya 0,93 persen (**Gambar 1.9**). Tantangan dalam lima tahun mendatang adalah membuka jalur dan memperluas jaringan perdagangan antardaerah dengan dukungan infrastruktur, pengembangan pusat-pusat perdagangan, penghapusan hambatan perdagangan antardaerah, serta pengembangan jaringan transportasi dan komunikasi.

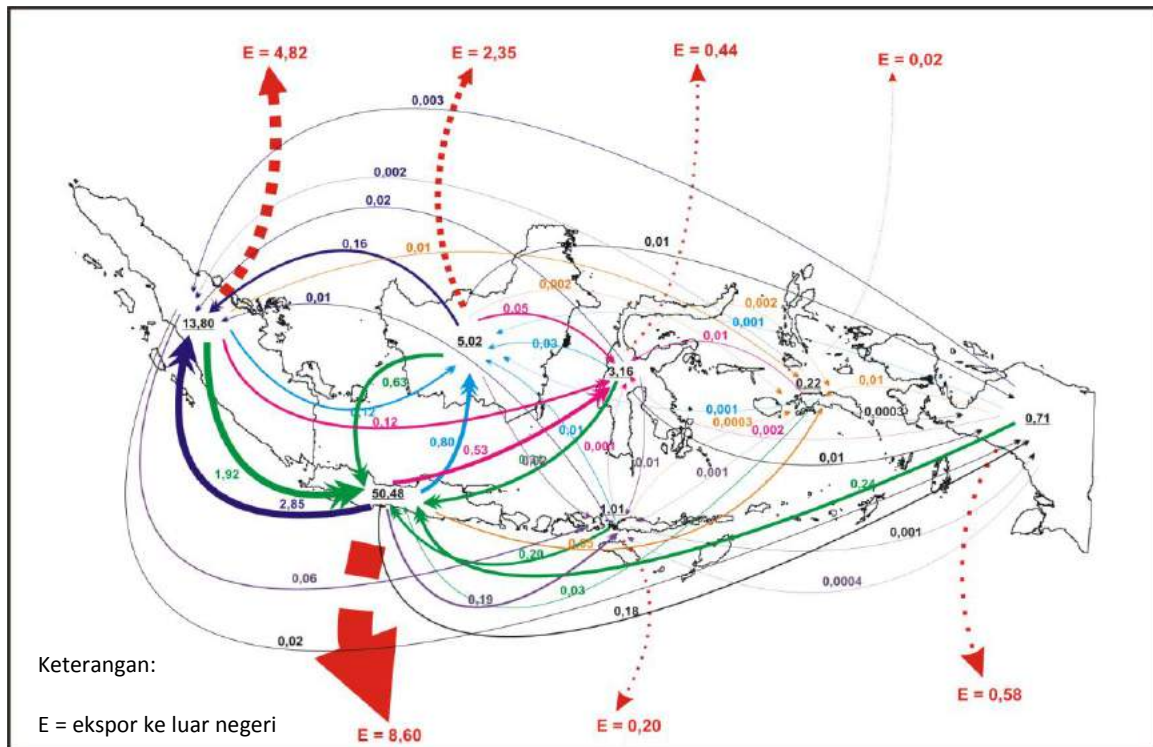
GAMBAR 1.9
ALIRAN INPUT PRODUKSI ANTARWILAYAH
(DALAM PERSEN TERHADAP TOTAL INPUT NASIONAL)



Sumber : Tabel Inter Regional Input Output 2005 (diolah)

Dalam perdagangan hasil produksi (output) antarwilayah, hasil produksi yang digunakan sendiri di masing-masing wilayah mencapai 74,40 persen, diperdagangkan antarwilayah mencapai 8,59 persen, dan diekspor ke luar negeri mencapai 17,01 persen. Perdagangan hasil produksi antara wilayah Jawa-Bali dan Sumatera mencapai 4,77 persen dari total nilai output, antara wilayah Jawa-Bali dan Kalimantan mencapai 1,43 persen, antara wilayah Jawa-Bali dan Sulawesi mencapai 0,84 persen, antara wilayah Jawa-Bali dan Maluku mencapai 0,07 persen, antara wilayah Jawa-Bali dan Papua mencapai 0,42 persen, dan antara wilayah Jawa-Bali dan Nusa Tenggara mencapai 0,39 persen. Dengan demikian, perdagangan hasil produksi antarwilayah di luar Jawa Bali hanya 0,67 persen (**Gambar 1.10**). Kondisi ini menunjukkan bahwa pusat perdagangan masih terbatas di Jawa-Bali. Dengan demikian, tantangan dalam lima tahun mendatang adalah membuka jalur dan memperluas jaringan perdagangan antardaerah, serta mendorong pengembangan pusat-pusat perdagangan di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua.

GAMBAR 1.10
ALIRAN OUTPUT PRODUKSI ANTARWILAYAH
(DALAM PERSEN TERHADAP TOTAL OUTPUT NASIONAL)



Sumber : Inter Regional Input Output 2005 (diolah)

Wilayah Jawa-Bali menjadi pusat perdagangan bahan baku dan hasil produksi nasional. Dengan pola perdagangan seperti itu, kegiatan investasi baik di Jawa-Bali maupun di luar Jawa-Bali akan memberikan nilai tambah lebih besar bagi wilayah Jawa-Bali baik berupa meningkatnya permintaan bahan baku maupun meningkatnya permintaan konsumsi hasil produksi. Kenaikan investasi di luar Jawa-Bali akan diikuti oleh meningkatnya bahan baku yang berasal dari wilayah Jawa Bali seperti pupuk, bahan kimia, semen, mesin, kendaraan dan alat-alat berat. Peningkatan pendapatan wilayah luar Jawa-Bali sebagai hasil kegiatan investasi akan diikuti oleh meningkatnya permintaan berbagai hasil produksi dari Jawa-Bali berupa tekstil, barang-barang elektronik, kendaraan, makanan olahan dan hasil produksi lainnya. Kondisi ini akan menyebabkan pemusatan kegiatan ekonomi di wilayah Jawa-Bali dan menyebabkan ketimpangan antarwilayah sulit teratasi. Tantangan yang harus diatasi dalam lima tahun mendatang adalah mendorong pengembangan pusat-pusat pertumbuhan baru di wilayah Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua.

Dengan memperhitungkan nilai perdagangan luar negeri (ekspor dan impor), lemahnya keterkaitan ekonomi antarwilayah telah mengakibatkan terjadinya kehilangan nilai ekonomi yang cukup besar. Dalam perdagangan bahan baku, nilai impor total lebih besar dibanding nilai perdagangan domestik antarwilayah. Rasio bahan baku yang digunakan di wilayah Jawa-Bali dari impor dan bahan baku dari perdagangan antarwilayah adalah sebesar 2,15. Hal ini menyiratkan bahwa perluasan dan penguatan keterkaitan produksi dan perdagangan antarwilayah akan mengurangi ketergantungan terhadap impor. Selain itu, nilai perdagangan bahan baku dengan luar negeri untuk seluruh wilayah lebih besar dari nilai perdagangan antarwilayah, kecuali untuk wilayah Maluku, Nusa Tenggara dan Papua. Sebagai wilayah kepulauan yang tidak memiliki prasarana pendukung kegiatan ekspor-impor berskala besar, hasil produksi yang dihasilkan wilayah Maluku dan Nusa Tenggara lebih banyak dikirim ke wilayah Jawa-Bali. Kondisi ini menegaskan bahwa pengembangan pusat produksi dan perdagangan di Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua menjadi penting dan mendesak dalam memperkuat keterkaitan antarwilayah.

Perdagangan internasional merupakan salah satu upaya memacu pembentukan nilai tambah yang lebih besar. Salah satu persyaratan adalah membangun rantai kegiatan mulai dari hulu sampai hilir untuk menghasilkan komoditas yang memiliki nilai tambah tinggi dengan menggunakan sumber daya lokal. Dari data Input Output Antardaerah 2005 diketahui bahwa wilayah Jawa-Bali memasok bahan baku dan hasil produksi ke wilayah lain dalam bentuk hasil produksi industri pengolahan yang dikonsumsi langsung seperti makanan dan minuman, tekstil, alas kaki, pulp dan kertas serta karet dan barang dari karet, serta bahan baku produksi seperti bahan kimia, semen, besi baja dan logam dasar bukan besi, mesin listrik dan peralatan listrik, serta alat angkutan dan perbaikannya. Struktur produksi wilayah Jawa Bali menunjukkan 44 persen dari nilai output total diperoleh dari sektor industri pengolahan dengan menggunakan bahan baku sebagian besar dari impor. Sementara, wilayah Sumatera, Kalimantan dan Papua, nilai produksi total berasal dari hasil primer baik berupa hasil hutan maupun hasil tambang. Komposisi produksi primer di wilayah Sumatera mencapai 37,29 persen, Kalimantan mencapai 57,29 persen, dan Papua mencapai 79,18 persen.

Kondisi tersebut menyiratkan bahwa peningkatan permintaan konsumsi di seluruh wilayah akan diikuti dengan peningkatan hasil produksi industri pengolahan di wilayah Jawa-Bali dan sekaligus diikuti oleh peningkatan impor bahan baku industri pengolahan. Sementara, pembiayaan impor dilakukan dengan meningkatkan ekspor bahan primer yang dihasilkan dari wilayah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara dan Papua. Pola produksi seperti itu akan menyebabkan eksploitasi sumber daya alam dan lingkungan di wilayah tersebut dan kurang berkembangnya keterkaitan ekonomi antarwilayah. Struktur ekonomi yang demikian akan mempercepat terjadinya degradasi lingkungan, terkurasnya sumber daya alam, meningkatnya ketergantungan terhadap impor dan meningkatnya kesenjangan antara wilayah Jawa

Bali dengan wilayah lainnya. Oleh sebab itu, tantangan dalam lima tahun mendatang adalah mengembangkan perekonomian nasional dengan memperkuat keterkaitan antarwilayah, membangun dan memperkuat rantai industri hulu hilir produk unggulan berbasis sumber daya lokal, mengembangkan pusat-pusat produksi dan perdagangan di luar wilayah Jawa Bali yang didukung dengan penyediaan prasarana dan sasraan, peningkatan SDM, pusat-pusat penelitian, pembangkit listrik dan penyediaan air bersih; serta perbaikan pelayanan sesuai standar pelayanan minimal.

Penguatan keterkaitan antarwilayah juga perlu mempertimbangkan struktur ekonomi wilayah terutama dari segi sektor penyumbang PDRB, sektor pendorong pertumbuhan ekonomi dan sektor penyerap tenaga kerja. Struktur ekonomi nasional didukung oleh sektor industri pengolahan sebesar 25,91 persen, sektor perdagangan 18,46 persen dan sektor pertanian 15,27 persen. Sektor pertanian menjadi penyumbang utama PDRB di seluruh wilayah dengan kontribusi terbesar wilayah Maluku (32,6 persen) dan terendah wilayah Jawa Bali (11,3 persen). Sementara, sektor industri pengolahan berkembang di tiga wilayah, yaitu Sumatera, Jawa-Bali dan Kalimantan. Di wilayah lainnya sektor industri pengolahan tidak terlalu dominan. Selain itu, terdapat pula sektor pertambangan yang termasuk tiga besar dalam menyumbang perekonomian wilayah di Sumatera, Kalimantan, Nusa Tenggara serta Papua.

TABEL 1.5
STRUKTUR PEREKONOMIAN, PERTUMBUHAN DAN SERAPAN TENAGA KERJA
MENURUT PROVINSI TAHUN 2005-2008

Provinsi	Sektor Utama Penyumbang PDRB (%)	Sektor Utama Pendorong Pertumbuhan Ekonomi (%)	Sektor Utama Penyerap Tenaga Kerja (%)
Nanggroe Aceh Darussalam	Pertanian (25,54), Pertambangan dan penggalian (24,06), Industri Pengolahan (13,99)	Listrik, Gas dan Air Bersih(8,31), Bangunan(9,78), Pengangkutan dan Komunikasi (8,33)	Pertanian(54,16), Perdagangan, Hotel dan Restoran(6,41), Jasa-jasa(14,38)
Sumatera Utara	Pertanian (25,4), Industri Pengolahan (24,71), Perdagangan hotel dan restoran (18,57)	Bangunan(10,81), Pengangkutan dan Komunikasi(11,75), Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan(10,59)	Pertanian(49,69), Perdagangan, Hotel dan Restoran(20,98), Jasa-jasa(10,76)
Sumatera Barat	Pertanian (25,26), Perdagangan, hotel dan Restoran (17,21), Pengangkutan dan	Listrik, Gas dan Air Bersih(8,73), Pengangkutan dan Komunikasi(9,45), Keuangan, Persewaan dan	Pertanian(50,04), Perdagangan, Hotel dan Restoran(20,93),Jasa-jasa,(12,19)

Provinsi	Sektor Utama Penyumbang PDRB (%)	Sektor Utama Pendorong Pertumbuhan Ekonomi (%)	Sektor Utama Penyerap Tenaga Kerja (%)
	komunikasi (14,79)	Jasa Perusahaan(7,02)	
Riau	Pertanian (20,82), Pertambangan dan penggalian (43,39), Industri Pengolahan (18,66)	Pertanian(3,16), Bangunan(1,4), Jasa-jasa(4,97)	Pertanian(46,67), Perdagangan, Hotel dan Restoran(17,25), Jasa-jasa,(14,34)
Jambi	Pertanian (21,79), Pertambangan dan penggalian (21,86), Industri Pengolahan (18,25)	Bangunan(13,48), Perdagangan, Hotel dan Restoran(7,81), Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan(12,79)	Pertanian(58,22), Perdagangan, Hotel dan Restoran(15,24), Jasa-jasa,(11,12)
Sumatera Selatan	Pertanian (18,10), Pertambangan dan penggalian (26,08), Industri Pengolahan (22,06)	Pengangkutan dan Komunikasi(11,91), Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan(8,69), Jasa-jasa(8,91)	Pertanian(62,56), Perdagangan, Hotel dan Restoran(14,91), Jasa-jasa(8,43)
Bengkulu	Pertanian (38,57), Industri Pengolahan (10,06), Perdagangan hotel dan restoran (16,29)	Pertanian(6,39), Listrik, Gas dan Air Bersih(7,03), Jasa-jasa(6,93)	Pertanian(65,25), Perdagangan, Hotel dan Restoran(12,52), Jasa-jasa(10,16,
Lampung	Pertanian (35,89), Industri Pengolahan (14,43), Perdagangan, Hotel dan Restoran (14,61)	Pertanian(5,84), Pengangkutan dan Komunikasi(6,22), Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan(7,98)	Pertanian(59,63), Perdagangan, Hotel dan Restoran(15,58), Jasa-jasa(9,22)
Bangka Belitung	Pertanian (23,72), Pertambangan dan Penggalian (17,46), Industri Pengolahan (18,84)	Bangunan(8,21), Perdagangan(12,87), Jasa-jasa(10,42)	Pertanian(32,80), Pertambangan dan Penggalian(24,58), Perdagangan, Hotel dan Restoran(17,61)
Kepulauan Riau	Pertambangan(9,81), Industri pengolahan(53,49), Pedagangan, Hotel dan Restoran(13,40)	Listrik,Gas dan Air bersih(53,66), Bangunan(23,5), Pengangkutan dan Komunikasi(12,24)	Pertanian(30,54), Industri Pengolahan(18,81), Perdagangan, Hotel dan Restoran(15,93)



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Provinsi	Sektor Utama Penyumbang PDRB (%)	Sektor Utama Pendorong Pertumbuhan Ekonomi (%)	Sektor Utama Penyerap Tenaga Kerja (%)
DKI Jakarta	Industri Pengolahan (16,67), Perdagangan, Hotel dan Restoran (20,32), Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan (28,99)	Bangunan(7,11), Perdagangan(7,01), Pengangkutan dan Komunikasi(12,24)	Industri Pengolahan(17,56), Perdagangan, Hotel dan Restoran(34,57), Jasa-jasa(26,51)
Jawa Barat	Industri Pengolahan (36,90), Perdagangan Hotel dan Restoran (19,69), Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan (9,9)	Pertanian(6,42), Industri Pengolahan(7,32), Bangunan(8,98)	Pertanian(27,52), Industri Pengolahan(18,18), Perdagangan, Hotel dan Restoran(25,59)
Jawa Tengah	Pertanian (19,75), Industri Pengolahan (33,58), Perdagangan, Hotel dan Restoran (19,8)	Pertambangan dan Penggalian(7,75), Listrik, Gas dan Air Bersih(6,56), Pengangkutan dan Komunikasi(6,77)	Pertanian(37,09), Industri Pengolahan(21,73), Perdagangan, Hotel dan Restoran(12,36)
D.I Yogyakarta	Petanian 17,99), Perdagangan, Hotel dan Restoran 28,4), Jasa-jasa (28,23)	Pertanian(11,32), Pengangkutan dan Komunikasi(4,76), Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan(5,43)	Pertanian(35,34), Perdagangan, Hotel dan Restoran(22,98), Jasa-jasa(16,29)
Jawa Timur	Pertanian, Industri Pengolahan, Perdagangan Hotel dan Rrestoran	Pertanian(9,41), Listrik, Gas dan Air Bersih(8,08), Pengangkutan dan Komunikasi(6,48)	Pertanian(44,32), Industri Pengolahan(19,27), Perdagangan, Hotel dan Restoran(12,21)
Banten	Pertanian (10,63), Industri Pengolahan (46,3), Perdagangan, Hotel dan Restoran (18,85)	Pertambangan dan Penggalian(7,86), Perdagangan, Hotel dan Restoran(9,79), Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan(11,26)	Pertanian(22,72), Industri Pengolahan(26,26), Perdagangan, Hotel dan Restoran(14,28)
Bali	Pertanian(23,00), Perdagangan, Hotel dan Restoran(26,47), Jasa-jasa(15,91)	Listrik, Gas dan Air Bersih(6,82), Perdagangan Hotel dan Restoran(5,62), Pengangkutan dan Komunikasi(6,38)	Pertanian(34,59), Industri Pengolahan(22,21), Perdagangan, Hotel dan Restoran(14,02)

Provinsi	Sektor Utama Penyumbang PDRB (%)	Sektor Utama Pendorong Pertumbuhan Ekonomi (%)	Sektor Utama Penyerap Tenaga Kerja (%)
Nusa Tenggara Barat	Pertanian(24,60), Pertambangan dan Penggalian(31,40), Perdagangan, Hotel dan Restoran(11,91)	Listrik, Gas dan Air Bersih(9,77), Bangunan(12,51), Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan(6,99)	Pertanian(49,58), Perdagangan, Hotel dan Restoran(14,89), Jasa-jasa(12,51)
Nusa Tenggara Timur	Pertanian(35,48), Perdagangan, Hotel dan Restoran(15,57), Jasa-jasa(16,37)	Perdagangan, Hotel dan Restoran(6,48), Pengangkutan dan Komunikasi(7,58), Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan(6,64)	Pertanian(74,82), Industri Pengolahan(5,86), Jasa-jasa(7,46)
Kalimantan Barat	Pertanian(18,72), Industri Pengolahan(32,27), Perdagangan, Hotel dan Restoran(20,97)	Pertanian(9,37), Pertambangan dan Penggalian(8,68), Pengangkutan dan komunikasi(6,10)	Pertanian(62,80), Perdagangan, Hotel dan Restoran(12,24), Jasa-jasa(8,13)
Kalimantan Tengah	Pertanian(30,35), Perdagangan, Hotel dan Restoran(22,53), Jasa-jasa(12,97)	Pertambangan dan Penggalian(143,31), Listrik, Gas dan Air Bersih(11,64), Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan(32,64)	Pertanian(62,54), Perdagangan, Hotel dan Restoran(12,54), Jasa-jasa(10,30)
Kalimantan Selatan	Pertanian(21,05), Pertambangan dan penggalian(25,62), Perdagangan, Hotel dan Restoran(13,96)	Pertambangan dan Penggalian(20,69), Bangunan(8,07) Perdagangan, Hotel dan Restoran(10,95)	Pertanian(47,35), Perdagangan, Hotel dan Restoran(22,04), Jasa-jasa(9,82)
Kalimantan Timur	Pertambangan(41,26), Industri Pengolahan(34,44), Perdagangan, Hotel dan Restoran(6,98)	Perdagangan(8,99), Pengangkutan dan Komunikasi(9,92), Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan(9,58)	Pertanian(38,43), Perdagangan, Hotel dan Restoran(17,26), Jasa-jasa(12,17)
Sulawesi Utara	Pertanian(23,65), Bangunan(12,92), Perdagangan, Hotel dan Restoran(18,54)	Listrik, Gas dan Air Bersih(10,14), Pengangkutan dan Komunikasi(7,57), Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan(7,97)	Pertanian(39,65), Perdagangan, Hotel dan Restoran(15,17), Jasa-jasa(14,83)



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Provinsi	Sektor Utama Penyumbang PDRB (%)	Sektor Utama Pendorong Pertumbuhan Ekonomi (%)	Sektor Utama Penyerap Tenaga Kerja (%)
Sulawesi Tengah	Pertanian(36,59), Perdagangan, Hotel dan Restoran(13,12), Jasa-jasa(12,00)	Pertambangan dan Penggalian(34,10), Industri Pengolahan(10,33), Pengangkutan dan Komunikasi(13,02)	Pertanian(62,70), Perdagangan, Hotel dan Restoran(12,39), Jasa-jasa(11,84)
Sulawesi Selatan	Pertanian(17,66), Pertambangan dan Penggalian(25,70), Industri Pengolahan(24,50)	Listrik, Gas dan Air Bersih(7,51), Bangunan(6,98), Pengangkutan dan Komunikasi(7,64)	Pertanian(52,76), Perdagangan, Hotel dan Restoran(17,99), Jasa-jasa(9,14)
Sulawesi Tenggara	Pertanian(33,40), Perdagangan, Hotel dan Restoran(25,70), Jasa-jasa(13,80)	Industri Pengolahan(11,05), Listrik, Gas dan Air Bersih(11,36), Pengangkutan dan Komunikasi(10,24)	Pertanian(57,95), Perdagangan, Hotel dan Restoran(14,98), Jasa-jasa(10,90)
Gorontalo	Pertanian(33,14), Perdagangan, Hotel dan Restoran(16,07), Jasa-jasa(15,93)	Pertambangan dan Penggalian(9,50), Pengangkutan dan Komunikasi(8,39), Jasa-jasa(10,37)	Pertanian(54,19), Perdagangan, Hotel dan Restoran(11,48), Jasa-jasa(15,13)
Sulawesi Barat	Pertanian(20,44), Pertambangan dan penggalian(52,49), Perdagangan, Hotel dan Restoran(6,42)	Pertambangan dan Penggalian(16,21), Bangunan(14,41), Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan(15,33).	Pertanian(63,43), Perdagangan, Hotel dan Restoran(12,60), Jasa-jasa(8,72)
Maluku	Pertanian(34,33), Perdagangan, Hotel dan Restoran(22,66), Jasa-jasa(18,65)	Industri Pengolahan(6,83), Bangunan(6,12), Pengangkutan dan Komunikasi(9,08)	Pertanian(64,47), Perdagangan, Hotel dan Restoran(9,93), Jasa-jasa(12,00)
Maluku Utara	Pertanian(43,97), Industri Pengolahan(10,97), Perdagangan, Hotel dan Restoran(18,29)	Perdagangan Hotel dan Restoran(7,15), Pengangkutan dan Komunikasi(9,21) Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan(7,32).	Pertanian(60,44), Perdagangan, Hotel dan Restoran(12,56), Jasa-jasa(10,68)
Papua Barat	Pertanian(26,64), Pertambangan dan Penggalian(16,68), Industri	Bangunan(13,02), Pengangkutan dan Komunikasi(12,87), Keuangan, Persewaan dan	Pertanian(48,40), Perdagangan, Hotel dan Restoran(12,11), Jasa-jasa(19,20)

Provinsi	Sektor Utama Penyumbang PDRB (%)	Sektor Utama Pendorong Pertumbuhan Ekonomi (%)	Sektor Utama Penyerap Tenaga Kerja (%)
	Pengolahan(20,50)	Jasa Perusahaan(13,49).	
Papua	Pertanian(11,99) Pertambangan dan Penggalian(64,95), Perdagangan, Hotel dan Restoran(5,50)	Pertambangan dan Penggalian(4,65), Pengangkutan dan Komunikasi(3,66), Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan(16,44)	Pertanian(75,79), Perdagangan, Hotel dan Restoran(6,75), Jasa-jasa(8,47)

Sumber : Badan Pusat Statistik (diolah)

Dengan memperhatikan perbedaan karakteristik antarwilayah, pembangunan berbasis kewilayahan merupakan jawaban untuk mendorong peningkatan produktivitas dan daya saing nasional dengan mengutamakan pengelolaan sumber daya lokal secara lebih efisien dan efektif guna mendorong keserasian dan keseimbangan pembangunan antarwilayah, serta memperhatikan kaidah pembangunan secara berkelanjutan dan menjaga kesinambungan pembangunan.

1.3 Arahan Umum dalam RPJPN 2005-2025

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 menyebutkan bahwa visi pembangunan nasional adalah terwujudnya Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur. Salah satu misi pembangunan jangka panjang yang terkait dengan pembangunan wilayah adalah mewujudkan pemerataan pembangunan dan mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional. Selain itu, arahan RPJPN 2005-2025 untuk RPJMN 2010-2014 menyebutkan bahwa pembangunan diarahkan untuk lebih memantapkan penataan kembali Indonesia di segala bidang dengan menekankan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia termasuk pengembangan kemampuan ilmu dan teknologi serta penguatan daya saing perekonomian.

1.4 Arah Pengembangan Wilayah dalam RPJMN 2010-2014

Berdasarkan arahan umum pembangunan wilayah RPJPN 2005-2025, dan prioritas dalam RPJMN 2010-2014, maka arah pengembangan wilayah ditujukan untuk (1) mendorong terwujudnya kemakmuran, kesejahteraan dan kemajuan secara adil dan merata di seluruh wilayah; (2) mendorong pengembangan dan pemerataan pembangunan wilayah secara terpadu sebagai kesatuan kegiatan sosial, ekonomi, dan budaya dengan memperhatikan potensi, karakteristik dan daya dukung lingkungannya; (3) menciptakan keseimbangan pemanfaatan ruang antara kawasan berfungsi lindung



dan budidaya dalam satu ekosistem pulau dan perairannya; (4) menciptakan keseimbangan pemanfaatan ruang wilayah darat, laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil dalam satu kesatuan wilayah kepulauan; (5) meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pembangunan lintas sektor dan lintas wilayah yang konsisten dengan kebijakan nasional; (6) memulihkan daya dukung lingkungan untuk mencegah terjadinya bencana yang lebih besar dan menjamin keberlanjutan pembangunan; (7) menciptakan kesatuan dan keutuhan wilayah darat, laut dan udara sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia; (8) mengurangi gangguan keamanan; dan (9) menghapuskan potensi konflik sosial untuk tercapainya Indonesia yang maju, mandiri dan adil. Selain itu, pengembangan wilayah juga ditujukan untuk mewujudkan seluruh wilayah nusantara sebagai satu kesatuan sosial, budaya, ekonomi, politik dan pertahanan dan keamanan yang semakin maju, produktif dan berkembang sebagai landasan utama dalam menyambut terwujudnya Masyarakat Ekonomi ASEAN.

1.5 Strategi Pengembangan Wilayah dalam RPJMN 2010-2014

Berdasarkan arah pengembangan wilayah tersebut diatas, maka strategi pengembangan wilayah 2010-2014 adalah sebagai berikut :

1. mendorong pertumbuhan wilayah-wilayah potensial di luar Jawa-Bali dan Sumatera dengan tetap menjaga momentum pertumbuhan di wilayah Jawa-Bali dan Sumatera;
2. meningkatkan keterkaitan antarwilayah melalui peningkatan perdagangan antar pulau untuk mendukung perekonomian domestik;
3. meningkatkan daya saing daerah melalui pengembangan sektor-sektor unggulan di tiap wilayah;
4. mendorong percepatan pembangunan daerah tertinggal, kawasan strategis dan cepat tumbuh, kawasan perbatasan, kawasan terdepan, kawasan terluar, dan daerah rawan bencana; serta
5. mendorong pengembangan wilayah laut dan sektor-sektor kelautan.

Arah dan strategi kebijakan pengembangan di tiap wilayah mengacu pada strategi dan arah kebijakan yang berbasiskan perencanaan wilayah darat melalui Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan berbasiskan perencanaan wilayah laut melalui Arah Pengembangan Wilayah Laut.

1.5.1 Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional

Penataan ruang wilayah nasional bertujuan untuk mewujudkan: (1) ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan; (2) keharmonisan

antara lingkungan alam dan lingkungan buatan; (3) keterpaduan perencanaan tata ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota; (4) keterpaduan pemanfaatan ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia; (5) keterpaduan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota dalam rangka perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang; (6) pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat; (7) keseimbangan dan keserasian perkembangan antarwilayah; (8) keseimbangan dan keserasian kegiatan antarsektor; dan (9) pertahanan dan keamanan negara yang dinamis serta integrasi nasional.

Kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah nasional meliputi kebijakan dan strategi pengembangan struktur ruang dan pola ruang. Kebijakan pengembangan struktur ruang meliputi: (1) Strategi untuk peningkatan akses pelayanan perkotaan dan pusat pertumbuhan ekonomi wilayah meliputi: (a) menjaga keterkaitan antarkawasan perkotaan, antara kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan, serta antara kawasan perkotaan dan wilayah di sekitarnya; (b) mengembangkan pusat pertumbuhan baru di kawasan yang belum terlayani oleh pusat pertumbuhan; (c) mengendalikan perkembangan kota-kota pantai; dan (d) mendorong kawasan perkotaan dan pusat pertumbuhan agar lebih kompetitif dan lebih efektif dalam pengembangan wilayah di sekitarnya. Sedangkan, strategi untuk peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana meliputi: (a) meningkatkan kualitas jaringan prasarana dan mewujudkan keterpaduan pelayanan transportasi darat, laut, dan udara; (b) mendorong pengembangan prasarana telekomunikasi terutama di kawasan terisolasi; (c) meningkatkan jaringan energi untuk memanfaatkan energi terbarukan dan tak terbarukan secara optimal serta mewujudkan keterpaduan sistem penyediaan tenaga listrik; (d) meningkatkan kualitas jaringan prasarana serta mewujudkan keterpaduan sistem jaringan sumber daya air; dan (e) meningkatkan jaringan transmisi dan distribusi minyak dan gas bumi, serta mewujudkan sistem jaringan pipa minyak dan gas bumi nasional yang optimal.

Kebijakan dan strategi pengembangan pola ruang meliputi: (1) kebijakan dan strategi pengembangan kawasan lindung; (2) kebijakan dan strategi pengembangan kawasan budi daya; dan (3) kebijakan dan strategi pengembangan kawasan strategis nasional.

1.5.2 Pengembangan Wilayah Pulau-Pulau Besar

Kebijakan pengembangan wilayah diarahkan untuk mendorong percepatan pembangunan wilayah Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua dengan tetap mempertahankan momentum pembangunan di Wilayah Jawa-Bali dan Sumatera. Percepatan pembangunan wilayah ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta mengurangi kesenjangan.



I. Pengembangan Wilayah Sumatera

Wilayah Sumatera merupakan salah satu pulau terbesar di Indonesia yang berperan penting dalam mendukung peningkatan kinerja pembangunan nasional. Wilayah Sumatera memiliki posisi geografis yang relatif strategis di wilayah barat Indonesia dan berhadapan langsung dengan kawasan Asia Timur yang menjadi salah satu pusat perekonomian dunia dan memiliki hubungan interaksi paling dekat dengan pulau Jawa sebagai pusat perekonomian di Indonesia.

Pembangunan wilayah Sumatera diarahkan untuk menjadi pusat produksi dan industri pengolahan hasil pertanian tanaman pangan, perkebunan, perikanan; lumbung energi nasional, pusat perdagangan dan pariwisata sehingga wilayah Sumatera menjadi salah satu wilayah utama dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN. Sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) pengembangan wilayah Sumatera diarahkan untuk (1) memantapkan interaksi antar-kawasan pesisir timur, kawasan tengah, dan kawasan, pesisir barat Sumatera melalui pengembangan sistem jaringan transportasi darat, laut, dan transportasi udara lintas Sumatera yang handal; (2) mendorong berfungsinya pusat-pusat permukiman perkotaan sebagai pusat pelayanan jasa koleksi dan distribusi di Pulau Sumatera; (3) mengembangkan akses bagi daerah terisolir dan pulau-pulau kecil di pesisir barat dan timur Sumatera sebagai sentra produksi perikanan, pariwisata, minyak dan gas bumi ke pusat kegiatan industri pengolahan serta pusat pemasaran lintas pulau dan lintas negara; (4) mempertahankan kawasan lindung sekurang-kurangnya 40 persen dari luas Pulau Sumatera dalam rangka mengurangi resiko dampak bencana lingkungan yang dapat mengancam keselamatan masyarakat dan asset-asset sosial-ekonominya yang berbentuk prasarana, pusat permukiman maupun kawasan budidaya; (5) mengembangkan komoditas unggulan wilayah yang memiliki daya saing tinggi melalui kerjasama lintas sektor dan lintas wilayah provinsi dalam pengelolaan dan pemasarannya dalam rangka mendorong kemandirian akses ke pasar global dengan mengurangi ketergantungan pada negara-negara tetangga; (6) menghindari konflik pemanfaatan ruang pada kawasan perbatasan lintas wilayah meliputi lintas wilayah provinsi, lintas wilayah kabupaten dan kota; (7) mempertahankan dan melestarikan budaya lokal dari pengaruh negatif globalisasi dan liberalisasi perdagangan dunia; dan (8) memantapkan keterkaitan antara kawasan andalan, kawasan budidaya lainnya, berikut kota-kota pusat-pusat kegiatan didalamnya dengan kawasan-kawasan dan pusat-pusat pertumbuhan antar pulau di wilayah nasional, serta dengan pusat-pusat pertumbuhan di kawasan sub-regional ASEAN, Asia Pasifik dan kawasan internasional lainnya.

Pusat-pusat pengembangan di wilayah Sumatera yang merupakan Pusat Kegiatan Nasional (PKN) diarahkan untuk: (1) mendorong pengembangan kota Lhokseumawe, Dumai dan Batam di wilayah Timur dan kota Padang di wilayah Barat sebagai pusat pelayanan primer; (2) mengendalikan pengembangan kawasan perkotaan Medan-Binjai-Deli Serdang, Bandar Lampung dan sekitarnya (dsk), dan Palembang dsk,

sebagai pusat pelayanan primer yang sesuai dengan daya dukung lingkungannya; dan (3) mendorong pengembangan kota Pekanbaru dan Jambi sebagai pusat pelayanan sekunder.

II. Pengembangan Wilayah Jawa-Bali

Wilayah Jawa Bali relatif maju dan berkembang dibanding wilayah lainnya. Dengan dinamika perubahan yang terjadi, wilayah Jawa dan Bali sebagai pusat kegiatan ekonomi nasional akan menghadapi berbagai isu strategis antara lain meningkatnya jumlah penduduk perkotaan; bergesernya struktur ekonomi mengarah pada peningkatan sektor jasa; menurunnya daya dukung sumber daya alam dan lingkungan; meningkatnya kelas menengah yang disertai dengan menguatnya kesadaran tentang hak-hak dasar; serta berubahnya cara pandang, nilai dan gaya hidup yang lebih mengglobal. Berbagai isu strategis tersebut akan mempunyai implikasi pada perubahan tatanan sosial, ekonomi, sumberdaya, tata ruang, budaya dan politik.

Dalam lima tahun ke depan, pembangunan wilayah Jawa-Bali diarahkan untuk tetap mempertahankan fungsi lumbung pangan nasional, mengembangkan industri pengolahan secara terkendali dan memperkuat interaksi perdagangan, serta meningkatkan mutu pelayanan jasa dan pariwisata bertaraf internasional sebagai wilayah utama dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN, dengan tetap memperhatikan keseimbangan ekosistem dan kaidah pembangunan yang berkelanjutan.

Sesuai arahan RTRWN pengembangan wilayah Jawa-Bali diarahkan untuk: (1) mempertahankan Pulau Jawa-Bali sebagai lumbung pangan nasional melalui berbagai upaya menetapkan dan mempertahankan kawasan produksi pangan; (2) mempertahankan dan merehabilitasi kawasan lindung yang semakin terdesak oleh kegiatan budidaya hingga mencapai luasan minimal 30% dari keseluruhan luas Wilayah Pulau Jawa-Bali, khususnya di Pulau Jawa bagian Selatan dan Pulau Bali bagian Tengah; (3) mempertahankan sumber-sumber air dan merehabilitasi daerah resapan air untuk menjaga ketersediaan air sepanjang tahun; (4) mengendalikan pertumbuhan pusat-pusat permukiman perkotaan dan perdesaan yang berpotensi mengganggu kawasan-kawasan yang rawan bencana serta mengancam keberadaan kawasan lindung dan kawasan produksi pangan melalui pengendalian aspek kependudukan dan kegiatan sosial-ekonominya; (5) mengendalikan secara ketat pengembangan industri hingga ambang batas toleransi lingkungan yang aman bagi keberlanjutan pembangunan; (6) mengintegrasikan kegiatan industri ke dalam zona-zona dan kawasan-kawasan industri yang telah ditetapkan; (7) mendorong pusat-pusat permukiman perkotaan sebagai pusat pelayanan jasa koleksi dan distribusi di Pulau Jawa-Bali; (8) mengembangkan zona-zona pemanfaatan minyak dan gas untuk wilayah perairan laut dan/atau lepas pantai; dan (9) mempertahankan dan merehabilitasi kawasan cagar budaya.

Pusat-pusat pengembangan di wilayah Jawa-Bali yang merupakan PKN



diarahkan untuk: (1) mengendalikan pengembangan secara fisik kawasan Perkotaan Jabodetabek, Bandung, Gerbangkertosusila, dan Denpasar sebagai pusat pelayanan primer dengan memperhatikan daya dukung lingkungannya; (2) mendorong pengembangan kawasan perkotaan Yogyakarta dan sekitarnya dan Semarang sebagai pusat pelayanan primer; dan (3) mendorong pengembangan kawasan perkotaan Serang dan sekitarnya, Cilacap dan sekitarnya, Cirebon dan sekitarnya, dan Surakarta dan sekitarnya sebagai pusat pelayanan sekunder.

III. Pengembangan Wilayah Kalimantan

Pengembangan wilayah Kalimantan mempunyai peran yang sangat penting dalam mendukung peningkatan kinerja pembangunan nasional. Wilayah Kalimantan memiliki potensi sumber daya alam dan lingkungan yang besar, dan posisi geografis yang relatif strategis di tengah Indonesia untuk mendukung dan memperkuat keterkaitan antarwilayah.

Pembangunan wilayah Kalimantan dalam lima tahun mendatang diarahkan untuk meningkatkan produktivitas dan nilai tambah perkebunan, peternakan, perikanan, dan pengolahan hasil hutan; serta meningkatkan nilai tambah hasil pertambangan dan berfungsi sebagai lumbung energi nasional dengan tetap memperhatikan keseimbangan ekosistem dan kaidah pembangunan yang berkelanjutan. Sesuai RTRWN, pengembangan wilayah Kalimantan diarahkan untuk: (1) memelihara dan memulihkan kawasan-kawasan yang berfungsi lindung dan kritis lingkungan dalam rangka mendukung keberlanjutan pemanfaatan sumber daya kehutanan, pertambangan, dan pertanian, serta sumberdaya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil, serta mengurangi resiko dampak bencana alam; (2) mendayagunakan posisi strategis secara geografis yang berdekatan dengan negara bagian Malaysia di Sarawak dan Sabah dalam kerangka kerjasama ekonomi subregional BIMP-EAGA (*Brunei Darussalam – Indonesia – Malaysia – Phillippines East ASEAN Growth Area*); (3) mendorong percepatan penanganan kawasan perbatasan antar negara dengan negara Malaysia di Serawak dan Sabah sebagai beranda depan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia di Pulau Kalimantan; (4) meningkatkan aksesibilitas internal wilayah Pulau Kalimantan untuk mewujudkan sinergi pengembangan potensi wilayah dan pemerataan tingkat perkembangan antar wilayah melalui percepatan fungsionalisasi jaringan jalan lintas Kalimantan secara terpadu dengan pengembangan jaringan angkutan sungai, angkutan laut, jaringan jalan rel kereta api dan angkutan udara; (5) mendorong peran kawasan andalan sebagai penggerak pengembangan ekonomi wilayah Kalimantan; (6) mengembangkan industri pengolahan yang berbasis pada sektor kelautan, pertanian, perkebunan, pertambangan, dan kehutanan secara berkelanjutan, serta industri pariwisata yang berbasis pada penguatan dan pengembangan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat lokal dan kelestarian lingkungan hidup; serta (7) mendorong pusat-pusat permukiman perkotaan sebagai

pusat pelayanan jasa koleksi dan distribusi di Pulau Kalimantan.

Pusat-pusat pengembangan di Pulau Kalimantan yang merupakan PKN diarahkan untuk: (1) mendorong pengembangan kota Balikpapan, Banjarmasin, dan Pontianak sebagai pusat pelayanan primer; dan (2) mendorong pengembangan kota Palangka Raya, Samarinda, Bontang, dan Tarakan, sebagai pusat pelayanan sekunder. Selanjutnya, pengembangan Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) di Pulau Kalimantan terutama kawasan perbatasan negara diarahkan untuk mendorong pengembangan Kota Aruk, Jagoibabang, Nangabadau, Entikong, Jasa, Nunukan, Simanggaris, Long Midang, dan Long Pahangai.

IV. Pengembangan Wilayah Sulawesi

Pengembangan wilayah Sulawesi, sebagai salah satu pulau terbesar di Indonesia, sangat penting dalam mendukung peningkatan kinerja pembangunan nasional. Wilayah Sulawesi mempunyai potensi besar dan akses perdagangan yang cukup strategis sehingga menjadi salah satu pusat pertumbuhan di kawasan timur Indonesia dan sub-regional ASEAN.

Pembangunan wilayah Sulawesi diarahkan untuk menjadi salah satu lumbung pangan nasional dengan meningkatkan produktivitas dan nilai tambah pertanian tanaman pangan, perkebunan dan perikanan; mengembangkan bioenergi; serta meningkatkan dan memperluas perdagangan, jasa dan pariwisata bertaraf internasional. Sesuai RTRWN pengembangan wilayah Sulawesi diarahkan untuk: (1) mendorong perkembangan peran Pulau Sulawesi sebagai salah satu wilayah yang memiliki peluang-peluang eksternal cukup besar; (2) mengembangkan komoditas unggulan Pulau Sulawesi yang memiliki daya saing tinggi melalui kerjasama lintas sektor dan lintas wilayah provinsi dalam pengelolaan dan pemasarannya; (3) memprioritaskan kawasan-kawasan tertinggal dan kawasan perbatasan dalam rangka pencapaian pemerataan tingkat perkembangan antar wilayah, termasuk pengembangan pulau-pulau kecil dan gugus kepulauan; (4) memanfaatkan potensi sumber daya di darat dan laut secara optimal serta mengatasi potensi konflik lintas wilayah provinsi yang terjadi di beberapa wilayah perairan dan daratan; (5) mempertahankan keberadaan sentra-sentra produksi pangan nasional, khususnya bagi sawah-sawah beririgasi teknis dari ancaman konversi lahan; (6) memantapkan keterkaitan antara kawasan andalan dan kawasan budidaya lainnya, berikut kota-kota pusat-pusat kegiatan didalamnya, dengan kawaskawasan dan pusat-pusat pertumbuhan antar pulau di wilayah nasional, serta dengan pusat-pusat pertumbuhan di kawasan sub-regional ASEAN, Asia Pasifik dan kawasan internasional lainnya dalam menciptakan daya saing wilayah; (7) mempertahankan dan merehabilitasi kawasan lindung hingga mencapai luasan minimal 40 persen dari luas Pulau Sulawesi dalam rangka mengurangi resiko dampak bencana lingkungan yang dapat mengancam keselamatan masyarakat dan asset-asset sosial-ekonominya yang berbentuk prasarana, pusat permukiman maupun kawasan budidaya; (8)



mempertahankan dan merehabilitasi kawasan cagar budaya sebagai asset sosialbudaya masyarakat yang memiliki nilai-nilai budaya tradisional dan kearifan lokal. (9) mengembangkan industri pengolahan yang berbasis pada sektor kelautan, pertanian, perkebunan, pertambangan, dan kehutanan secara berkelanjutan; dan (10) mengembangkan pemanfaatan ruang untuk mewadahi dinamika kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya.

Pusat-pusat pengembangan di Pulau Sulawesi yang merupakan PKN diarahkan untuk: (1) Mendorong optimalisasi pengembangan kawasan perkotaan Maminasata (Makassar–Maros–Sungguminasa–Takalar) dan Manado - Bitung sebagai pusat pelayanan primer yang sesuai dengan daya dukung lingkungannya; dan (2) Mendorong pengembangan kota-kota Gorontalo, Palu, Kendari dan Mamuju sebagai pusat pelayanan sekunder.

V. Pengembangan Wilayah Nusa Tenggara

Pengembangan wilayah Nusa Tenggara, sebagai salah satu wilayah kepulauan dengan gugusan pulau yang tersebar dan berbatasan dengan negara tetangga Timor Leste, perlu dilakukan dengan kebijakan dan program yang terpadu dan tepat sesuai dengan potensi yang dimiliki dan berbagai hambatan yang dihadapi. Wilayah Kepulauan Nusa Tenggara yang terletak di sebelah timur wilayah Jawa-Bali belum sepenuhnya mendapat manfaat dari interaksi ekonomi dengan pusat kegiatan nasional. Pengembangan wilayah Nusa Tenggara perlu mengoptimalkan produktivitas dan nilai tambah perkebunan, peternakan, perikanan dan pariwisata dengan memperhatikan keterkaitan wilayah-wilayah pulau.

Pembangunan wilayah Kepulauan Nusa Tenggara diarahkan untuk meningkatkan produktivitas dan nilai tambah perkebunan, peternakan dan perikanan dengan memperhatikan keterkaitan wilayah-wilayah pulau. Sesuai RTRWN pengembangan wilayah Nusa Tenggara diarahkan untuk: (1) mengembangkan kota-kota di kawasan pesisir sebagai Pusat Pelayanan kegiatan industri kemaritiman terpadu sebagai sektor basis yang didukung oleh prasarana dan sarana yang memadai, khususnya transportasi, energi, dan sumber daya air; (2) mengembangkan wilayah darat, laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil sebagai satu kesatuan wilayah Kepulauan Nusa Tenggara melalui kegiatan pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang yang terpadu didukung oleh prasarana dan sarana yang memadai; (3) meningkatkan aksesibilitas antar kota-kota pesisir yang menghubungkan poros Banda Aceh–Atambua, sehingga membentuk keterkaitan sosial ekonomi yang kuat; (4) meningkatkan keterkaitan pengembangan antarkawasan (kawasan andalan dan kawasan andalan laut) untuk mengoptimalkan potensi wisata budaya dan wisata alam, termasuk wisata bahari, dengan mengembangkan jalur wisata terpadu Bali -Lombok –Komodo–Tana Toraja; (5) mengembangkan komoditas unggulan termasuk pemasaran ekspor, dengan mengutamakan pengelolaan sumberdaya alam terbarukan berdasarkan prinsip

kemanfaatan bersama antarwilayah maupun antarkawasan; (6) memanfaatkan keberadaan Forum Kerjasama Daerah dan Forum Kerjasama Ekonomi Internasional baik secara bilateral dengan Australia dan Timor Leste, maupun secara multilateral dalam konteks kerjasama ekonomi sub-regional; (7) meningkatkan perlindungan kawasan konservasi nasional di Kepulauan Nusa Tenggara khususnya konservasi laut agar kelestariannya terpelihara; dan (8) mengelola kawasan perbatasan darat dengan Timor Leste dan kawasan perbatasan laut dengan Timor Leste dan Australia sebagai beranda depan negara.

Pusat pengembangan di wilayah Nusa Tenggara yang merupakan PKN diarahkan untuk mendorong pengembangan kota Mataram dan Kupang sebagai pusat pelayanan primer yang sesuai dengan daya dukung lingkungannya.

VI. Pengembangan Wilayah Maluku

Pengembangan wilayah Maluku, sebagai salah satu wilayah kepulauan dengan gugusan pulau yang tersebar dan berbatasan dengan negara tetangga, perlu dilakukan dengan kebijakan dan program yang terpadu dan tepat sesuai dengan potensi yang dimiliki dan berbagai hambatan yang dihadapi. Pembangunan wilayah Maluku diarahkan untuk meningkatkan produktivitas dan nilai tambah perikanan, pariwisata, perkebunan dan peternakan dengan memperhatikan keterkaitan wilayah-wilayah pulau.

Sesuai RTRWN pengembangan wilayah Maluku diarahkan untuk: (1) mengembangkan kota-kota pesisir sebagai pusat pelayanan kegiatan industri kemaritiman terpadu yang merupakan sektor basis dengan dukungan prasarana dan sarana yang memadai, khususnya transportasi, energi, dan sumber daya air; (2) mengembangkan wilayah darat, laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil sebagai satu kesatuan wilayah Kepulauan Maluku melalui kegiatan pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang yang terpadu yang didukung oleh prasarana dan sarana yang memadai; (3) mempertahankan kawasan konservasi untuk menjamin daya dukung lingkungan yang optimal bagi pengembangan wilayah; (4) memacu pertumbuhan ekonomi wilayah Kepulauan Maluku melalui pengembangan sektor-sektor unggulan yang berbasis sumber daya setempat dan meningkatkan keterkaitan antar pusat-pusat pertumbuhan di darat, pesisir, dan pulau-pulau kecil; (5) memanfaatkan sumber daya alam secara produktif dan efisien, agar terhindar dari pemborosan sehingga dapat memberi manfaat sebesar-besarnya berdasarkan prinsip-prinsip kelestarian; serta (6) meningkatkan ketersediaan, kualitas, dan memperluas jangkauan pelayanan prasarana dasar, khususnya transportasi laut dan udara yang didukung oleh transportasi antar moda secara terpadu dan optimal dengan mengikutsertakan dunia usaha.

Pengembangan PKN di Kepulauan Maluku diarahkan untuk mengendalikan pengembangan kota Ambon dan Ternate - Sofifi, sebagai pusat pelayanan primer yang



sesuai dengan daya dukung lingkungannya.

VII. Pengembangan Wilayah Papua

Pengembangan wilayah Papua sebagai salah satu pulau terbesar di Indonesia dengan posisi paling timur dan berbatasan langsung dengan negara tetangga Papua Nugini memiliki tantangan yang lebih sulit dibanding wilayah lainnya. Tantangan terbesar adalah meningkatkan mutu sumber daya manusia dengan perhatian yang sama terhadap seluruh wilayah pesisir, wilayah pegunungan, dan wilayah dataran, serta sekaligus membangun keterkaitan antarwilayah dalam satu kesatuan tata ruang wilayah. Pembangunan wilayah Papua diarahkan untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia; produktivitas dan nilai tambah perkebunan, peternakan dan perikanan dengan memperhatikan keterkaitan wilayah-wilayah pulau.

Sesuai RTRWN pengembangan wilayah Papua diarahkan untuk: (1) mendukung peningkatan serta memperkuat persatuan, kesatuan dan keutuhan kehidupan bangsa dan pertahanan negara; (2) menempatkan hak ulayat dalam penataan ruang sebagai salah satu upaya untuk mempertahankan nilai-nilai sosial budaya setempat; (3) memanfaatkan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara produktif dan efisien agar terhindar dari pemborosan dan penurunan daya dukung lingkungan sehingga dapat memberi manfaat sebesar-besarnya berdasarkan prinsip-prinsip kelestarian dan berkelanjutan; (4) mempertahankan kawasan lindung sekurang-kurangnya 50 persen dari luas wilayah Pulau Papua; (5) memacu pertumbuhan ekonomi wilayah Pulau Papua melalui pengembangan sektor-sektor unggulan yang berbasis sumber daya setempat dan meningkatkan keterkaitan antar pusat-pusat pertumbuhan; (6) menampung kegiatan ekonomi, memperluas lapangan kerja, dan sekaligus memenuhi fungsi sebagai pusat pelayanan usaha melalui pengembangan kawasan dan pusat pertumbuhan; (7) meningkatkan keterkaitan yang saling menguntungkan antara kawasan andalan dan tertinggal dalam rangka peningkatan kesejahteraan ekonomi daerah di sekitar kawasan andalan; (8) meningkatkan ketersediaan dan kualitas, serta memperluas jangkauan pelayanan prasarana dasar, khususnya transportasi laut yang didukung oleh transportasi antarmoda secara terpadu dan optimal dengan mengikutsertakan dunia usaha; dan (9) meningkatkan pengembangan wilayah pedalaman dan perbatasan yang tertinggal dan terisolasi dengan menyeraskan laju pertumbuhan antar wilayah.

Pusat-pusat pengembangan di Papua yang merupakan PKN diarahkan untuk: (1) mendorong pengembangan kota Sorong dan Jayapura sebagai pusat pelayanan primer yang sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan; dan (2) mendorong pengembangan kota, Manokwari dan Timika sebagai pusat pelayanan sekunder yang sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan.

1.5.3 Pengembangan Wilayah Laut

Sebagai negara kepulauan, pemanfaatan tata ruang wilayah laut nasional masih belum optimal bagi pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan nasional. Sumbangan produksi dan pendapatan dari pengelolaan laut masih belum memadai sehingga belum mampu mengatasi masalah kemiskinan nelayan dan ketertinggalan kawasan pesisir. Di sisi lain, beberapa wilayah laut menghadapi ancaman penurunan stok ikan dan kerusakan terumbu karang sebagai akibat pola pemanfaatan yang kurang berkelanjutan.

Dalam RPJPN 2005-2025, salah satu misi pembangunan adalah “mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional”. Misi ini dicapai dengan menumbuhkan wawasan bahari bagi masyarakat dan pemerintah agar pembangunan Indonesia berorientasi kelautan; meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia yang berwawasan kelautan melalui pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kelautan; mengelola wilayah laut nasional untuk mempertahankan kedaulatan dan kemakmuran; dan membangun ekonomi kelautan secara terpadu dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber kekayaan laut secara berkelanjutan.

Oleh karena itu, dalam lima tahun mendatang pelaksanaan pembangunan diarahkan untuk menempatkan wilayah laut sebagai sarana untuk mendorong keterkaitan antarwilayah dengan mengembangkan dan memperkuat rantai produksi dan distribusi komoditas unggulan wilayah, khususnya industri berbasis kelautan. Pengembangan wilayah laut juga akan dilakukan melalui pendekatan wilayah terpadu dengan memperhatikan potensi mineral dan energi, potensi perikanan, potensi wisata bahari, potensi industri maritim, potensi transportasi, dan teknologi dengan tetap mempertahankan keragaman hayati dan menjaga kelestarian ekosistem laut. Pembangunan wilayah laut menjadi bagian tak terpisahkan dari pembangunan wilayah yang meliputi tujuh gugus pulau/kepulauan utama Sumatera, Jawa-Bali, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua.

Dengan mempertimbangkan sektor unggulan dan potensi keterkaitan depan dan belakang dengan sektor-sektor lain, wilayah laut yang dapat dikembangkan meliputi: (1) wilayah pengembangan kelautan Sumatera, (2) wilayah pengembangan kelautan Malaka, (3) wilayah pengembangan kelautan Sunda, (4) wilayah pengembangan kelautan Jawa, (5) wilayah pengembangan kelautan Natuna, (6) wilayah pengembangan kelautan Makassar-Buton, (7) wilayah pengembangan kelautan Banda-Maluku, (8) wilayah pengembangan kelautan Sawu, dan (9) wilayah pengembangan kelautan Papua-Sulawesi. Dari sembilan wilayah pengembangan kelautan tersebut, dengan memperhatikan fungsi strategisnya dalam penguatan keterkaitan antarwilayah maka dipilih lima wilayah prioritas pengembangan untuk periode 2010-2014 yaitu Wilayah Pengembangan Kelautan Sumatera, Malaka, Jawa, Makassar-Buton, dan Banda-Maluku.

I. Wilayah Pengembangan Kelautan Sumatera

Wilayah pengembangan kelautan Sumatera terletak di sebelah barat Pulau Sumatera yang memanjang dari Sabang di bagian utara hingga Lampung di bagian selatan. Di bagian utara wilayah ini berbatasan dengan Laut Andaman, di bagian timur laut berbatasan dengan wilayah pengembangan Natuna, di sebelah selatan berbatasan dengan wilayah pengembangan kelautan Sunda, dan di barat berbatasan dengan Samudera Hindia. Geologi wilayah ini merupakan pertemuan antara kontinen Asia dan Samudera Hindia, dan terdapat pergerakan kontinen ke arah kanan melalui patahan Sumatera dan tunjaman Samudera Hindia yang relatif miring terhadap kontinen Asia.

Potensi perikanan meliputi ikan hias di Pulau Breuh dan Sibolga, ikan kakap, kerapu, kerang-kerangan, teripang, dan tiram merata di bagian barat Sumatera. Di samping itu juga terdapat potensi rumput laut di pesisir Painan dan Lampung. Aneka jenis koral dan terumbu karang dapat ditelusuri di Kepulauan Simeulue dan Mentawai. Potensi migas ditemukan di Cekungan Busur Muka lepas pantai Bengkulu serta potensi pasir besi di sepanjang pantai Padang. Potensi wisata alam dan budaya sangat potensial dikembangkan di Kepulauan Nias dan Mentawai. Wilayah ini hanya dilewati oleh satu jalur pelayaran nasional dan nusantara, namun wilayah perbatasan internasional di bagian barat merupakan jalur pelayaran internasional yang cukup sibuk.

Arah kebijakan pengembangan wilayah kelautan Sumatera adalah pengembangan industri berbasis kelautan, khususnya pengolahan hasil laut, dengan memperkuat keterkaitan dengan wilayah Jawa. Industri pengolahan hasil laut memiliki dampak pengganda yang besar bagi perekonomian wilayah Sumatera bagian barat. Strategi yang ditempuh adalah: (1) penyiapan sumber daya manusia terampil di bidang kelautan; (2) pembangunan transportasi laut dan wilayah pesisir; (3) peningkatan kapasitas energi listrik; (4) pengembangan skema pembiayaan perbankan yang mudah diakses nelayan dan pelaku usaha kecil menengah di kawasan pesisir; dan (5) pengembangan sistem jaminan atau perlindungan risiko. Arah kebijakan dan strategi wilayah ini dipadukan dengan arah kebijakan dan strategi pengembangan wilayah Sumatera.

II. Wilayah Pengembangan Kelautan Malaka

Wilayah pengembangan kelautan Malaka terbentang dari perairan Selat Malaka hingga Kepulauan Riau, serta berbatasan dengan perairan Aceh di utara, perairan Malaysia dan Singapura di timur, wilayah pengembangan kelautan Natuna di selatan, dan daratan Sumatera di barat. Wilayah ini merupakan jalur pelayaran internasional yang padat dan wilayah yang berisiko tinggi terjadinya konflik dengan negara tetangga. Wilayah ini didominasi Cekungan Busur Belakang di perairan Sumatera Utara hingga Sumatera bagian tengah yang kaya akan sumber daya migas. Potensi granit tua dan

endapan pasir ditemukan di Kepulauan Riau. Potensi timah terdapat di Kepulauan Singkep, sedangkan pasir kuarsa yang cukup besar ditemukan di lepas pantai Riau dekat Pulau Rupat. Wilayah ini memiliki potensi perikanan budidaya (kakap putih, kerapu, kerang-kerangan, teripang, tiram, dan rumput laut. Potensi perikanan tangkap (ikan hias) juga ditemukan di sekitar Pulau Sabang dan Pulau Bintan. Keragaman hayati di perairan ini dicirikan oleh keluarga Moluska dan Teripang serta spesies penyu. Habitat terumbu karang didominasi oleh terumbu karang tepi. Namun, padatnya aktivitas pelayaran dan eksplorasi migas di wilayah ini menghadirkan ancaman polusi pencemaran minyak dan limbah lainnya.

Pengembangan wilayah ini diarahkan pada peningkatan keamanan dan ketertiban serta keberlanjutan ekosistem laut sehingga pemanfaatan sumber daya alam bisa dilakukan secara optimal. Untuk itu strategi yang diperlukan adalah: (1) penegasan batas-batas teritorial dan yuridiksi wilayah dengan negara tetangga; (2) peningkatan pengawasan kawasan perbatasan untuk menghindari penyelundupan, perompakan, pencurian ikan, dan perdagangan pasir ilegal; (3) penegakan peraturan terkait dengan pemeliharaan dan pelestarian lingkungan laut; dan (4) pemanfaatan pulau-pulau terdepan sebagai kawasan wisata atau pusat konservasi satwa laut. Arah kebijakan dan strategi wilayah ini dipadukan dengan arah kebijakan dan strategi pengembangan wilayah Sumatera.

III. Wilayah Pengembangan Kelautan Jawa

Wilayah pengembangan kelautan Jawa terletak di antara Pulau Kalimantan dan Pulau Jawa. Di sebelah timur wilayah ini berbatasan dengan wilayah pengembangan kelautan Makassar dan di barat berbatasan dengan Pulau Sumatera. Wilayah ini terletak di laut dalam di antara pulau besar dan merupakan jalur pelayaran nasional dan nusantara yang padat. Pelayaran internasional juga melintasi bagian timur perairan ini. Ancaman yang muncul dalam pengembangan wilayah lau ini adalah menurunnya kualitas lingkungan sebagai akibat pencemaran minyak dan limbah yang bersumber dari aliran sungai-sungai di Pulau Jawa.

Wilayah ini merupakan kontinen Asia yang proses tumbukannya dengan kontinen India membentuk cekungan yang kaya sumber daya alam. Cadangan migas banyak ditemukan di perairan ini. Emas ditemukan di muara Sungai Barito, sementara endapan timah di sekitar Bangka Belitung. Dengan posisi di antara pulau-pulau besar, permasalahan yang dihadapi adalah pemanfaatan potensi perikanan secara berlebihan melebihi batas lestari, serta rusaknya habitat akibat pencemaran laut. Wilayah perairan ini menyimpan potensi udang karang, teripang, kerang mutiara, kakap, kerapu, teripang, dan rumput laut, namun tingkat pemanfaatannya sudah sangat tinggi.

Pengembangan wilayah perairan ini diarahkan pada penguatan fungsi wilayah kelautan sebagai perekat keterkaitan ekonomi antarwilayah dengan tetap menjaga



kelestarian ekosistem laut. Strategi yang akan dilaksanakan adalah: (1) peningkatan sistem transportasi laut untuk mempermudah arus barang antar pulau khususnya ke wilayah timur Indonesia; (2) penegakan peraturan terkait dengan pemeliharaan dan pelestarian lingkungan laut; (3) pengendalian pembuangan limbah industri dan rumah tangga melalui sungai-sungai yang bermuara di perairan Jawa; (4) pengendalian erosi di wilayah daerah aliran sungai (DAS) untuk menghindari pendangkalan pelabuhan ikan dan pelabuhan laut; (5) pengembangan perikanan budidaya; dan (6) pengurangan risiko pencemaran perusakan habitat laut oleh kegiatan eksplorasi dan eksploitasi migas lepas pantai. Arah kebijakan dan strategi wilayah kelautan ini dipadukan dengan arah kebijakan dan strategi wilayah Jawa-Bali dan Kalimantan.

IV. Wilayah Pengembangan Kelautan Makassar-Buton

Wilayah pengembangan kelautan Makassar terletak di antara Pulau Sulawesi di sebelah timur dan Pulau Kalimantan di sebelah barat. Di utara, wilayah ini berbatasan dengan Laut Sulawesi (wilayah pengembangan kelautan Papua), sedangkan di selatan berbatasan dengan Kepulauan Nusa Tenggara. Wilayah ini sangat strategis dalam menghubungkan Kawasan Barat Indonesia (KBI) dan Kawasan Timur Indonesia (KTI). Wilayah ini juga berfungsi sebagai penyangga bagi pertemuan antara dua lempeng besar: lempeng Asia dan lempeng Australia. Dinamika geologis perairan ini dicirikan oleh pengkerutan sedimen di sebelah utara Bali-Lombok-Flores, pembentukan kompleks delta Mahakam yang kaya akan migas, dan patahan mendatar Palu-Koro yang berkaitan erat dengan aktifnya gempa bumi di Sulawesi dan pengendapan emas di Teluk Bone. Wilayah ini dicirikan oleh tingginya keragaman hayati yang tersebar cukup luas. Kecuali Selat Makassar, pemanfaatan potensi perikanan wilayah ini masih dapat lebih ditingkatkan. Dari sisi transportasi, wilayah ini dilalui jalur pelayaran nasional dan nusantara yang cukup aktif. Di samping itu Selat Makassar juga dilintasi jalur pelayaran internasional yang cukup padat.

Kebijakan pengembangan wilayah ini diarahkan pada optimalisasi peran strategis kelautan dalam meningkatkan interaksi perdagangan intrapulau (antarprovinsi di Sulawesi) maupun dalam mendukung peran wilayah Sulawesi sebagai pusat pertumbuhan dan penggerak kawasan timur Indonesia. Strategi yang akan dilakukan adalah: (1) peningkatan sistem transportasi laut yang menghubungkan provinsi-provinsi di Pulau Sulawesi; (2) pemantapan sistem transportasi laut untuk memperkuat fungsi intermediasi Sulawesi bagi KBI dan KTI; (3) pembangunan pelabuhan-pelabuhan ikan dalam klaster-klaster industri pengolahan hasil laut; (4) pengembangan pelabuhan hub ekspor komoditas unggulan; (5) peningkatan pengawasan jalur pelayaran internasional untuk mencegah aktivitas penyelundupan; (6) pengembangan lembaga pendidikan dan kurikulum berbasis kelautan (perikanan, pariwisata, perkapalan); (7) pengembangan industri angkutan laut (perkapalan); dan (8) pengembangan wisata alam bahari. Arah kebijakan dan strategi wilayah kelautan ini

dipadukan dengan arah kebijakan dan strategi wilayah Kalimantan, Sulawesi, dan Nusa Tenggara.

V. Wilayah Pengembangan Kelautan Banda-Maluku

Wilayah pengembangan kelautan Banda-Maluku terletak di Kawasan Timur Indonesia (KTI), berbatasan dengan wilayah pengembangan kelautan Papua di utara, dengan daratan Pulau Papua di timur, dengan wilayah pengembangan kelautan Sawu di selatan, dan dengan wilayah pengembangan kelautan Makassar di barat. Secara geologis, wilayah ini dicirikan oleh dinamika tumbukan kontinen Australia ke arah barat terhadap kontinen Asia. Peregrakan lempeng Pasifik ke arah barat terhadap kontinen Asia berkontribusi pada kerawanan gempa di kawasan Seram dan Halmahera. Potensi migas ditemukan di daerah kepala burung, Seram dan Halmahera. Bahan semen juga ditemukan di Pulau Misool. Namun demikian wilayah ini baru dilayani beberapa jalur pelayaran nasional dan nusantara. Dengan demikian ancaman pencemaran laut masih rendah, terlihat dari relatif terjaganya keragaman hayati yang tinggi. Wilayah ini merupakan tempat bertelur beberapa spesies seperti penyu-penyuan. Potensi perikanan dan budidaya rumput laut juga sangat tinggi dengan tingkat pemanfaatan yang relatif rendah. Karakter gugus-gugus pulau yang khas juga merupakan potensi wisata alam wilayah ini seperti ditemukan di perairan Raja Ampat.

Arah kebijakan pengembangan wilayah kelautan Banda-Maluku adalah perintisan pengembangan industri berbasis sumber daya kelautan dan wisata alam. Sejalan dengan arah ini, strategi yang akan dilakukan adalah: (1) pengembangan sumber daya manusia berkecakupan tinggi di bidang kelautan (pendidikan dan pelatihan); (2) pengembangan komoditas unggulan bernilai tinggi berbasis kelautan seperti kerang mutiara dan ikan hias; (3) pengembangan industri angkutan laut (perkapalan); (4) pemberdayaan dan pengorganisasian masyarakat khususnya wilayah pesisir untuk memperkuat modal sosial; (5) peningkatan akses permodalan bagi nelayan; dan (6) pengembangan wisata bahari.

1.5.4 Pengembangan Kawasan

Dalam upaya mendukung percepatan pembangunan wilayah, kebijakan pembangunan wilayah diarahkan untuk: (1) pengembangan kawasan strategis dan cepat tumbuh, (2) pengembangan daerah tertinggal, kawasan perbatasan, dan rawan bencana, (3) pengembangan kawasan perkotaan dan perdesaan, dan (4) penataan dan pengelolaan pertanahan. Strategi yang diterapkan adalah:

1. Mendorong percepatan pembangunan dan pertumbuhan wilayah-wilayah strategis dan cepat tumbuh sehingga dapat mengembangkan daerah-daerah tertinggal di sekitarnya dalam suatu sistem wilayah pengembangan ekonomi

yang sinergis dengan mengutamakan keterkaitan mata-rantai proses industri dan distribusi.

2. Meningkatkan pengembangan daerah-daerah tertinggal dan terpencil agar dapat tumbuh dan berkembang secara lebih cepat dan dapat mengurangi ketertinggalan pembangunannya dengan daerah lain.
3. Mengembangkan wilayah-wilayah perbatasan dengan mengutamakan kebijakan pembangunan yang berorientasi ke luar sehingga menjadi pintu gerbang dalam hubungan ekonomi dan perdagangan dengan negara tetangga.
4. Menyeimbangkan pertumbuhan pembangunan kota-kota metropolitan, besar, menengah, dan kecil dengan mengacu pada sistem pembangunan perkotaan nasional dengan tujuan mencegah terjadinya pertumbuhan fisik kota yang tidak terkendali seperti yang terjadi di wilayah pantai utara Jawa, serta mengendalikan arus migrasi masuk langsung dari desa ke kota-kota besar dan metropolitan melalui penciptaan kesempatan kerja, termasuk peluang usaha, di kota-kota menengah dan kecil, terutama di luar Pulau Jawa.
5. Mempercepat pembangunan kota-kota kecil dan menengah terutama di luar Pulau Jawa agar dapat berfungsi sebagai pusat layanan bagi masyarakat kota tersebut dan sebagai motor penggerak pembangunan wilayah-wilayah di sekitarnya.
6. Mendorong keterkaitan ekonomi wilayah perkotaan dan perdesaan dalam suatu sistem wilayah pengembangan ekonomi.
7. Menerapkan sistem pengelolaan pertanahan yang efisien, efektif, serta melaksanakan penegakan hukum terhadap hak atas tanah dengan menerapkan prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan demokrasi.
8. Mendorong perencanaan wilayah yang peduli/peka terhadap bencana alam terutama dengan mempertimbangkan kondisi geografis Indonesia yang berada di wilayah pertemuan tiga lempeng tektonik yang rawan bencana alam.

1.6 Perkiraan Perkembangan Wilayah

Pengembangan wilayah diarahkan untuk meningkatkan kinerja perekonomian nasional dan sekaligus mengurangi kesenjangan antarwilayah dengan mendorong percepatan pembangunan wilayah Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua dan tetap mempertahankan momentum pembangunan di Jawa-Bali dan Sumatera. Dengan arah pengembangan wilayah tersebut, berbagai sasaran pengembangan wilayah terutama untuk indikator pertumbuhan ekonomi (persentase laju perubahan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)), kemiskinan (persentase jumlah penduduk miskin terhadap jumlah penduduk), pengangguran (persentase

jumlah pengangguran terbuka terhadap total angkatan kerja), angka kematian bayi (jumlah bayi yang meninggal sebelum mencapai usia 1 tahun per 1000 kelahiran hidup), rata-rata lama sekolah (rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani) dan angka harapan hidup (perkiraan lama hidup rata-rata penduduk) dapat dilihat pada Tabel 1.6 dan Tabel 1.7 sebagai berikut.

TABEL 1.6
SASARAN PERTUMBUHAN EKONOMI, PENGANGGURAN
DAN KEMISKINAN WILAYAH TAHUN 2010-2014 (DALAM PERSEN)

Provinsi	Pertumbuhan Ekonomi		Kemiskinan		Pengangguran	
	2010	2014	2010	2014	2010	2014
Wilayah Sumatera						
1. Nanggroe Aceh Darussalam	4,5 - 5,0	5,5 - 6,1	20,55 - 20,01	14,47 - 14,06	7,4 - 8,2	5,7 - 6,3
2. Sumatera Utara	6,4 - 7,1	6,9 - 7,6	10,53 - 10,05	7,04 - 6,98	10,3 - 11,4	9,4 - 10,4
3. Sumatera Barat	4,4 - 4,8	6,0 - 6,5	7,73 - 7,24	4,51 - 4,44	8,4 - 9,3	7,5 - 8,3
4. Riau	4,6 - 5,0	6,5 - 7,2	8,51 - 8,11	5,47 - 5,32	5,8 - 6,4	5,6 - 6,2
5. Jambi	4,8 - 5,3	6,9 - 7,6	7,65 - 7,12	4,27 - 4,22	4,2 - 4,7	3,1 - 3,5
6. Sumatera Selatan	5,5 - 6,0	6,2 - 6,9	15,34 - 14,04	11,39 - 10,89	7,9 - 8,7	6,8 - 7,6
7. Bengkulu	4,5 - 5,5	6,2 - 6,9	16,51 - 16,07	12,03 - 11,91	2,6 - 2,9	1,6 - 1,9
8. Lampung	5,5 - 6,1	6,2 - 6,9	18,29 - 17,84	13,99 - 13,24	5,4 - 6,0	4,7 - 5,2
9. Bangka Belitung	4,9 - 5,5	6,1 - 6,7	6,37 - 6,01	3,68 - 3,55	3,7 - 4,1	2,4 - 2,7
10. Kepulauan Riau	7,0 - 7,4	7,5 - 8,2	7,66 - 7,13	4,46 - 4,21	3,3 - 3,7	1,5 - 2,4
Wilayah Jawa-Bali						
11. DKI Jakarta	6,5 - 7,1	6,9 - 7,7	2,75 - 2,69	0,54 - 0,53	10,3 - 11,4	8,3 - 9,2
12. Jawa Barat	5,0 - 5,6	6,2 - 6,8	9,12 - 8,91	4,15 - 4,12	10,4 - 11,5	8,8 - 9,8
13. Jawa Tengah	6,2 - 6,8	7,1 - 7,7	14,92 - 14,34	11,58 - 11,37	7,1 - 7,8	5,4 - 6,0
14. DI Yogyakarta	4,8 - 5,3	6,2 - 6,9	15,36 - 15,03	11,87 - 10,76	5,5 - 6,1	4,3 - 4,7
15. Jawa Timur	5,8 - 6,4	7,1 - 7,8	14,62 - 14,24	11,23 - 10,95	6,5 - 7,2	5,7 - 6,3
16. Banten	5,9 - 6,4	6,5 - 7,2	6,79 - 6,23	3,13 - 3,09	15,4 - 17,0	14,9 - 16,5



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Provinsi	Pertumbuhan Ekonomi		Kemiskinan		Pengangguran	
	2010	2014	2010	2014	2010	2014
17. Bali	5,8 - 6,1	6,8 - 7,3	4,12 - 4,01	1,12 - 1,11	4,4 - 4,9	3,4 - 3,7
Wilayah Nusa Tenggara						
18. NTB	3,0 - 3,5	3,6 - 4,0	21,42 - 20,93	15,94 - 14,88	3,6 - 3,9	2,2 - 2,4
19. NTT	5,4 - 5,9	5,8 - 6,4	22,64 - 22,12	16,95 - 16,87	1,7 - 1,9	1,2 - 1,4
Wilayah Kalimantan						
20. Kalimantan Barat	4,7 - 5,2	4,8 - 5,4	8,03 - 7,94	4,66 - 4,59	5,7 - 6,2	4,9 - 5,4
21. Kalimantan Tengah	5,0 - 5,6	6,1 - 6,7	6,94 - 6,61	3,61 - 3,57	3,9 - 4,3	2,9 - 3,3
22. Kalimantan Selatan	5,5 - 5,9	6,3 - 6,9	4,01 - 3,85	1,01 - 1,01	5,1 - 5,6	3,9 - 4,3
23. Kalimantan Timur	3,0 - 3,5	3,6 - 4,1	5,87 - 5,52	2,03 - 2,01	8,2 - 9,1	5,5 - 6,1
Wilayah Sulawesi						
24. Sulawesi Utara	5,7 - 6,3	7,1 - 7,8	9,17 - 8,86	3,05 - 3,02	9,9 - 11,0	8,2 - 9,0
25. Sulawesi Tengah	8,5 - 9,0	9,0 - 10,1	17,33 - 16,93	12,09 - 11,96	6,4 - 7,1	5,9 - 6,5
26. Sulawesi Selatan	6,2 - 7,2	7,5 - 8,3	11,28 - 10,87	6,29 - 6,04	6,8 - 7,6	4,7 - 5,2
27. Sulawesi Tenggara	7,5 - 7,9	8,0 - 8,5	17,95 - 17,49	14,14 - 14,01	3,7 - 4,1	2,1 - 2,3
28. Gorontalo	6,8 - 7,3	7,0 - 8,5	24,13 - 23,98	19,49 - 18,56	4,6 - 5,0	2,9 - 3,2
29. Sulawesi Barat	5,8 - 6,5	6,2 - 7,0	14,06 - 13,93	10,03 - 9,99	4,1 - 4,5	2,7 - 3,0
Wilayah Maluku						
30. Maluku	4,9 - 5,4	5,4 - 6,0	27,04 - 26,75	22,23 - 21,76	7,7 - 8,5	5,2 - 5,8
31. Maluku Utara	5,5 - 6,3	6,0 - 6,8	9,45 - 9,07	5,38 - 5,02	4,7 - 5,1	3,0 - 3,3
Wilayah Papua						
32. Papua Barat	6,2 - 6,8	7,0 - 7,6	34,94 - 34,23	19,94 - 18,78	7,2 - 7,9	5,1 - 5,6
33. Papua	5,3 - 5,8	6,2 - 6,7	37,01 - 36,88	22,95 - 21,56	3,7 - 4,1	2,7 - 6,5

Sumber : Perhitungan Bappenas.

TABEL 1.7
SASARAN ANGKA KEMATIAN BAYI, RATA-RATA LAMA SEKOLAH DAN ANGKA
HARAPAN HIDUP TAHUN 2010-2014

Provinsi	Angka Kematian Bayi		Rata-Rata Lama Sekolah		Angka Harapan Hidup	
	2010	2014	2010	2014	2010	2014
Wilayah Sumatera						
1. Nanggroe Aceh Darussalam	32	30	8,90	9,30	69,08	69,61
2. Sumatera Utara	23	20	8,88	9,16	71,64	72,46
3. Sumatera Barat	27	23	8,25	8,56	70,58	71,70
4. Riau	22	20	8,44	8,78	71,92	72,57
5. Jambi	27	24	7,84	8,08	70,43	71,26
6. Sumatera Selatan	25	23	7,84	8,08	70,97	71,79
7. Bengkulu	29	25	8,08	8,26	69,97	71,06
8. Lampung	25	21	7,86	8,42	70,98	72,21
9. Bangka Belitung	26	24	8,10	9,30	70,72	71,35
10. Kepulauan Riau	20	19	9,60	10,80	72,38	72,73
Wilayah Jawa-Bali						
11. DKI Jakarta	8	7	11,6	12,4	75,84	76,51
12. Jawa Barat	27	24	8,10	8,70	70,36	71,41
13. Jawa Tengah	21	18	7,44	8,08	72,21	73,06
14. DI Yogyakarta	9	8	8,98	9,46	75,62	76,39
15. Jawa Timur	25	21	7,46	8,02	71,09	72,27
16. Banten	32	29	8,50	8,90	69,26	70,06
17. Bali	13	12	8,24	8,88	70,09	74,48
Wilayah Nusa Tenggara						
18. NTB	44	37	7,06	7,42	66,18	67,76
19. NTT	32	27	6,68	6,96	69,25	70,58
Wilayah Kalimantan						
20. Kalimantan Barat	28	25	7,06	7,42	70,31	71,04
21. Kalimantan Tengah	23	21	8,25	8,56	71,75	72,31

Provinsi	Angka Kematian Bayi		Rata-Rata Lama Sekolah		Angka Harapan Hidup	
	2010	2014	2010	2014	2010	2014
22. Kalimantan Selatan	34	30	7,68	7,96	68,54	69,79
23. Kalimantan Timur	20	14	9,24	9,68	72,63	73,74
Wilayah Sulawesi						
24. Sulawesi Utara	12	9	8,96	9,12	74,47	75,42
25. Sulawesi Tengah	35	31	7,98	8,26	70,28	71,39
26. Sulawesi Selatan	28	24	8,00	8,80	69,33	70,80
27. Sulawesi Tenggara	30	25	7,90	8,20	70,28	71,39
28. Gorontalo	31	26	7,10	7,40	68,28	69,51
29. Sulawesi Barat	28	24	7,50	8,70	69,82	71,01
Wilayah Maluku						
30. Maluku	32	28	9,00	9,40	69,12	70,18
31. Maluku Utara	35	29	9,00	9,40	68,42	69,91
Wilayah Papua						
32. Papua Barat	32	27	7,57	8,37	69,13	70,47
33. Papua	31	27	6,58	6,86	69,38	70,63

Sumber : Perhitungan Bappenas.

Dalam upaya menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional, berbagai kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di Jawa-Bali akan terus dilakukan. Sementara, untuk mengurangi kesenjangan antarwilayah ditempuh dengan meningkatkan produksi, investasi, dan perdagangan melalui pengembangan pusat-pusat pertumbuhan baru di wilayah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua. Kebijakan ini diharapkan akan mendorong perluasan kesempatan kerja dan pengurangan kemiskinan di luar Jawa-Bali. Kebijakan ini juga diharapkan akan mempercepat pemerataan antarwilayah. Salah satu implikasi dari percepatan pengembangan wilayah di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua adalah pergeseran alokasi investasi pemerintah ke wilayah tersebut. Sementara, pembangunan wilayah Jawa-Bali didukung oleh kerjasama investasi pemerintah dan swasta dan juga investasi swasta penuh.

1.7. Sinkronisasi Pusat-Daerah dan Antardaerah dalam Pencapaian Prioritas Nasional

Dalam upaya mewujudkan visi dan misi pembangunan 2009-2014 yang tertuang dalam Buku I RPJMN 2010-2014 perlu dirumuskan dan dijabarkan secara operasional dan terukur ke dalam program dan kegiatan prioritas kementerian/lembaga dan satuan kerja perangkat daerah. Dalam lima tahun mendatang sebelas prioritas nasional yang akan dilaksanakan adalah (1) reformasi birokrasi dan tata kelola; (2) pendidikan; (3) kesehatan; (4) penanggulangan kemiskinan; (5) ketahanan pangan; (6) infrastruktur; (7) iklim investasi dan usaha; (8) energi; (9) lingkungan hidup dan bencana; (10) daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan paska konflik; serta (11) kebudayaan, kreativitas, dan inovasi teknologi. Dalam upaya mewujudkan prioritas nasional tersebut, berbagai program aksi akan dilaksanakan di seluruh wilayah dengan memperhatikan fokus, potensi, dan permasalahan di setiap wilayah. Pencapaian prioritas nasional menurut wilayah secara umum dapat dijabarkan dalam uraian dan lampiran Matriks Pelaksanaan Prioritas Nasional sebagai berikut.

Prioritas 1: Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Pemantapan tata kelola pemerintahan yang lebih baik melalui terobosan kinerja secara terpadu, penuh integritas, akuntabel, taat kepada hukum yang berwibawa, dan transparan. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang ditopang oleh efisiensi struktur pemerintah di pusat dan di daerah, kapasitas pegawai pemerintah yang memadai, dan data kependudukan yang baik. Program aksi dan kegiatan prioritas dalam rangka reformasi birokrasi dan tata kelola dilaksanakan oleh kementerian/lembaga di seluruh wilayah. Pelaksanaan substansi inti program aksi bidang reformasi birokrasi dan tata kelola di setiap wilayah menekankan pada penataan otonomi daerah, peningkatan sumber daya manusia di daerah, percepatan harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundangan di tingkat pusat maupun daerah, penetapan dan penerapan sistem indikator kinerja utama pelayanan publik yang selaras antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah; peningkatan integrasi dan integritas penerapan dan penegakan hukum oleh seluruh lembaga dan aparat hukum; serta penetapan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan pengembangan Sistem Informasi dan Administrasi Kependudukan (SIAK) dengan aplikasi pertama pada Kartu Tanda Penduduk.

Prioritas 2: Pendidikan

Pembangunan pendidikan secara umum telah berhasil meningkatkan taraf pendidikan yang ditandai dengan membaiknya indikator rata-rata lama sekolah, menurunnya proporsi buta aksara penduduk usia 15 tahun ke atas, serta meningkatnya angka partisipasi kasar (APK) dan angka partisipasi murni (APM) pada semua jenjang



pendidikan. Keberhasilan pembangunan pendidikan masih belum tersebar secara merata di seluruh wilayah yang ditandai masih rendahnya ketersediaan tenaga pengajar dan akses terhadap pelayanan pendidikan terutama di daerah-daerah terpencil, serta masih rendahnya rasio guru per sekolah di SD/SMP/SMA yang umumnya berada di sebagian besar provinsi di Papua, Maluku, Nusa Tenggara, Kalimantan dan Sulawesi. Upaya yang akan dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut, yaitu melalui peningkatan akses pendidikan yang berkualitas, terjangkau, relevan, dan efisien menuju terangkatnya kesejahteraan hidup rakyat, kemandirian, keluhuran budi pekerti, dan karakter bangsa yang kuat. Pembangunan bidang pendidikan diarahkan untuk mendukung terciptanya angkatan kerja yang berkualitas secara merata di seluruh wilayah, yaitu : (1) menciptakan lapangan kerja atau kewirausahaan dan 2) menjawab tantangan kebutuhan tenaga kerja. Selain itu, prioritas pendidikan di seluruh wilayah mengutamakan pada peningkatan akses pendidikan dasar-menengah dan pendidikan tinggi serta peningkatan kualitas guru dan pengelolaan dan layanan sekolah

Prioritas 3: Kesehatan

Pembangunan kesehatan terus mengalami peningkatan yang ditandai dengan membaiknya status kesehatan dan gizi masyarakat. Permasalahan yang belum tuntas tertangani adalah kesenjangan status kesehatan dan gizi masyarakat antarwilayah, dan antartingkat sosial-ekonomi yang disebabkan oleh kurang meratanya sebaran infrastruktur kesehatan, rendahnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kesehatan, rendahnya akses terhadap pelayanan dasar kesehatan dan lemahnya monitoring dan pengendalian penyebaran penyakit-penyakit menular.

Pembangunan kesehatan akan dilakukan melalui pendekatan preventif, tidak hanya kuratif, melalui peningkatan kesehatan masyarakat dan lingkungan antara lain dengan perluasan penyediaan air bersih, pengurangan wilayah kumuh sehingga secara keseluruhan dapat mendukung upaya peningkatan usia harapan hidup secara nasional dari 70,6 tahun pada 2009 menjadi 72,0 tahun pada 2014, dan pencapaian keseluruhan sasaran Millenium Development Goals (MDGs) tahun 2015. Pelaksanaan program dan kegiatan prioritas kesehatan di setiap wilayah menekankan pada program kesehatan untuk masyarakat; program KB; peningkatan ketersediaan dan peningkatan kualitas layanan kesehatan dan obat-obatan serta penerapan Asuransi Kesehatan Nasional untuk seluruh keluarga miskin.

Prioritas 4: Penanggulangan Kemiskinan

Prioritas penanggulangan kemiskinan dilakukan di setiap wilayah diarahkan untuk mendukung penurunan tingkat kemiskinan absolut secara nasional dari 14,1 persen pada 2009 menjadi 8-10 persen pada 2014 dan perbaikan distribusi perawatan

dengan perlindungan sosial yang berbasis keluarga, pemberdayaan masyarakat dan perluasan kesempatan ekonomi masyarakat yang berpendapatan rendah. Beberapa implementasi di wilayah dari substansi inti program aksi bidang penanggulangan kemiskinan lebih menekankan pada pelaksanaan Bantuan Sosial Terpadu serta Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri.

Prioritas 5: Ketahanan Pangan

Prioritas ketahanan pangan dan lanjutan revitalisasi pertanian diarahkan untuk mewujudkan kemandirian pangan, peningkatan daya saing produk pertanian, peningkatan pendapatan petani, serta kelestarian lingkungan dan sumber daya alam. Program dan kegiatan prioritas di seluruh wilayah diutamakan pada pelaksanaan pengembangan kawasan dan tata ruang pertanian; peningkatan infrastruktur di sentra-sentra produksi pertanian; peningkatan penelitian dan pengembangan pertanian yang mampu menciptakan benih unggul dan meningkatkan kualitas dan produktivitas hasil pertanian yang tinggi; investasi pangan, pertanian, dan industri perdesaan berbasis produk lokal; sistem subsidi yang menjamin ketersediaan benih varietas unggul yang teruji, pupuk, teknologi dan sarana pasca panen yang sesuai secara tepat waktu, tepat jumlah, dan terjangkau; serta pengambilan langkah-langkah kongkrit terkait adaptasi dan antisipasi sistem pangan dan pertanian terhadap perubahan iklim.

Prioritas 6: Infrastruktur

Pembangunan infrastruktur diarahkan untuk memperkuat keterkaitan domestik, khususnya wilayah kepulauan, keragaman karakteristik antarwilayah menuntut respon substansi kegiatan yang berbeda sesuai dengan kebutuhan spesifik di setiap wilayah. Pelaksanaan program dan kegiatan prioritas pembangunan infrastruktur diarahkan pada penyelesaian pembangunan jalan Lintas Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Papua sepanjang total 19.370 km pada 2014; Pembangunan jaringan prasarana dan penyediaan sarana transportasi antar-moda dan antar-pulau yang terintegrasi; Pembangunan Rumah Sederhana Sehat Bersubsidi, Rusunami dan fasilitas pendukung kawasan permukiman yang dapat menampung keluarga yang kurang mampu; penyelesaian pembangunan prasarana pengendalian banjir, diantaranya Banjir Kanal Timur Jakarta dan penanganan secara terpadu Daerah Aliran Sungai Bengawan Solo; penuntasan pembangunan jaringan serat optik di Indonesia bagian timur serta perbaikan sistem dan jaringan transportasi di 4 kota besar (Jakarta, Bandung, Surabaya, Medan) sesuai dengan Cetak Biru Transportasi Perkotaan, termasuk penyelesaian pembangunan angkutan kereta listrik di Jakarta (MRT dan Monorail).

Prioritas 7: Iklim Investasi dan Iklim Usaha



Perbaiki iklim investasi dan iklim usaha diarahkan untuk mendorong peningkatan investasi, perluasan usaha dan percepatan pengembangan ekonomi di setiap wilayah melalui reformasi regulasi secara bertahap di tingkat nasional dan daerah; penerapan sistem pelayanan informasi dan perizinan investasi secara elektronik (SPSIE) pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di beberapa kota yang dimulai di Batam serta pengembangan KEK di 5 lokasi melalui skema Public-Private Partnership.

Prioritas 8: Energi

Tingkat ketersediaan energi terutama listrik sekitar 81,59 persen pasokan listrik diarahkan untuk memenuhi kebutuhan wilayah Jawa Bali, dan 11,6 persen untuk memenuhi kebutuhan wilayah Sumatera. Sementara, pasokan energi listrik untuk wilayah Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua kurang dari 10 persen. Keterbatasan pasokan energi listrik menjadi kendala bagi pengembangan kegiatan ekonomi. Penyediaan energi diarahkan pada peningkatan kapasitas pembangkit listrik; peningkatan pemanfaatan energi terbarukan termasuk energi alternatif *geothermal*; serta perluasan program konversi minyak tanah ke gas dan penggunaan gas alam sebagai bahan bakar angkutan umum perkotaan.

Prioritas 9: Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana

Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup akan dilakukan secara berhati-hati, cermat, bijaksana dan berkelanjutan sangat penting dalam menjaga kesinambungan dan kelestarian pembangunan nasional. Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan akan memperhatikan kaidah pembangunan berkelanjutan dan mempertahankan daya dukung dan fungsi dari lingkungan hidup, serta mencegah kerusakan sumber daya alam dan lingkungan.

Sebagai negara kepulauan, wilayah Indonesia yang sebagian besar berupa lautan (60 persen) merupakan negara yang sangat rentan terhadap perubahan iklim global serta masalah lonjakan penduduk. Selain itu, kondisi geografis Indonesia yang rawan terhadap bencana alam yaitu gempa bumi, banjir, gunung meletus, serta longsor memerlukan suatu tindakan yang tepat terkait upaya mitigasi bencana alam. Prioritas pengelolaan lingkungan hidup dan pengelolaan bencana dalam lima tahun mendatang akan mengutamakan peningkatan keberdayaan pengelolaan lahan gambut; penekanan laju kerusakan hutan; penurunan jumlah titik kebakaran hutan; penghentian kerusakan lingkungan di 11 Daerah Aliran Sungai yang rawan bencana; penjaminan berjalannya fungsi Sistem Peringatan Dini Tsunami, Sistem Peringatan Dini Cuaca, Sistem Peringatan Dini Iklim serta peningkatan kemampuan penanggulangan bencana.

Prioritas 10: Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, dan Pasca-Konflik

Percepatan pembangunan daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pasca konflik akan diarahkan untuk mengatasi penyebab ketertinggalan dengan mengutamakan peningkatan mutu sumber daya manusia, penyediaan prasarana dasar, pengelolaan sumber daya lokal, dan pemberdayaan ekonomi rakyat. Percepatan pembangunan akan diutamakan di daerah-daerah yang belum berkembang dan secara geografis terisolir dan terpencil, termasuk daerah perbatasan antar negara, pulau-pulau kecil, pedalaman, serta rawan bencana alam dan bencana sosial terutama di kawasan timur Indonesia. Selain itu, prioritas percepatan pembangunan juga diarahkan pada kawasan yang berbatasan langsung dengan negara tetangga.

Dalam lima tahun mendatang, program aksi untuk daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan pasca-konflik ditujukan untuk meningkatkan mutu hidup, menjamin keberlanjutan pembangunan di daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan keberlangsungan kehidupan damai di wilayah pasca-konflik. Selain itu, program aksi yang akan dilakukan adalah pengembangan dan penguatan kerjasama dengan negara-negara tetangga dalam rangka pengamanan wilayah dan sumber daya kelautan; penyelesaian pemetaan wilayah perbatasan RI dengan Malaysia, Papua Nugini, Timor Leste, dan Filipina, serta pengentasan daerah tertinggal.

Prioritas 11: Kebudayaan, Kreativitas, dan Inovasi Teknologi

Pengembangan kebudayaan, kreativitas dan inovasi teknologi sangat penting untuk menjaga dan melindungi keanekaragaman budaya, karya seni, dan ilmu, serta pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam meningkatkan produktivitas dan daya saing komparatif dan kompetisi bangsa bersumberkan pada keunggulan Indonesia sebagai negara maritim dan kepulauan. Pencapaian prioritas bidang kebudayaan, kreativitas dan inovasi teknologi akan diarahkan pada peningkatan penetapan dan pembentukan pengelolaan terpadu untuk pengelolaan Cagar Budaya, revitalisasi museum dan perpustakaan di seluruh Indonesia; penyediaan sarana yang memadai bagi pengembangan, pedalaman dan pagelaran seni budaya di kota besar dan ibu kota kabupaten; pengembangan kapasitas nasional dalam penelitian, penciptaan dan inovasi, dan meningkatkan akses dan penyebaran kepada masyarakat luas; peningkatan program-program seni budaya yang dirintis oleh masyarakat dan mendorong berkembangnya apresiasi terhadap kemajemukan budaya, serta peningkatan keunggulan komparatif menjadi keunggulan kompetitif yang mencakup pengelolaan sumber daya maritim menuju ketahanan energi, pangan, dan antisipasi perubahan iklim; dan pengembangan penguasaan teknologi dan kreativitas pemuda.

Prioritas Lainnya

Di samping sebelas prioritas nasional tersebut di atas, upaya untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan 2010-2014 juga melalui pencapaian prioritas nasional



lainnya di bidang politik, hukum, dan keamanan, di bidang perekonomian, dan di bidang kesejahteraan rakyat.

1.8. Sinergi antara Pusat-Daerah dan Antardaerah

Sinergi pusat-daerah dan antardaerah merupakan penentu utama kelancaran pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan yang tercantum dalam RPJMN 2010-2014. Sinergi pusat-daerah dan antardaerah dilakukan dalam seluruh proses mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi yang mencakup kerangka kebijakan, regulasi, anggaran, kelembagaan, dan pengembangan wilayah.

I. Sinergi dalam Kerangka Perencanaan Kebijakan

Salah satu faktor terpenting dalam sinergi pusat dan daerah adalah terwujudnya sinergi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah sehingga setiap kebijakan dirumuskan dengan memperhatikan dan menampung aspirasi daerah, serta mengutamakan penyelesaian permasalahan secara nyata di daerah. Selain itu, sinergi kebijakan juga dimaksudkan agar pemerintah daerah mampu memahami dan melaksanakan kebijakan pemerintah pusat dengan efisien dan efektif; serta mendukung pelaksanaan kebijakan tersebut dengan berbagai sumber daya yang tersedia.

Sinergi kebijakan pembangunan antara pusat dan daerah dan antardaerah diperlukan untuk: (1) memperkuat koordinasi antarpelaku pembangunan di pusat dan daerah; (2) menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antardaerah, antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah; (3) menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan; (4) mengoptimalkan partisipasi masyarakat di semua tingkatan pemerintahan; serta (5) menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Upaya bersama Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang dapat dilakukan antara lain: (1) sinergi berbagai dokumen perencanaan pembangunan (RPJP dan RPJPD, RPJM dan RPJMD, RKP dan RKPD); (2) sinergi dalam penetapan target pembangunan; (3) standarisasi indikator pembangunan yang digunakan oleh kementerian/lembaga dan satuan perangkat kerja daerah; (4) pengembangan *database* dan sistem informasi pembangunan yang lengkap dan akurat; (5) sinergi dalam kebijakan perijinan investasi di daerah; dan (6) sinergi dalam kebijakan pengendalian tingkat inflasi.

Sinergi dalam perencanaan kebijakan pembangunan pusat dan daerah baik lima tahunan maupun tahunan akan dilaksanakan dengan mengoptimalkan penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di semua tingkatan pemerintahan (desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi dan nasional) sehingga terwujud sinkronisasi antara kebijakan, program dan kegiatan

antarsektor, antarwaktu, antarwilayah, dan antara pusat dan daerah. Selain itu, Musrenbang juga diharapkan dapat lebih mendorong terciptanya proses partisipasi semua pelaku pembangunan dan berkembangnya transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

II. Sinergi dalam Kerangka Regulasi

Sinergi dalam kerangka regulasi diarahkan untuk mendorong harmonisasi peraturan perundang-undangan baik dalam bentuk Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Menteri dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan yang tercantum dalam RPJMN 2010-2014. Selain itu, sinergi juga diarahkan untuk meningkatkan kesepahaman, kesepakatan dan ketaatan dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, setiap kebijakan dan peraturan perundang-undangan di daerah baik Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur, Peraturan Bupati dan Peraturan Walikota harus harmonis dan sinkron dengan kebijakan dan peraturan perundang-undangan nasional baik Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri. Sinergi pusat dan daerah antara lain dilakukan dengan: (1) konsultasi dan koordinasi secara lebih efektif dalam penyusunan peraturan perundangan; (2) pembentukan forum koordinasi lintas instansi dalam rangka harmonisasi peraturan perundangan: baik penyusunan peraturan baru maupun review atas peraturan yang sudah ada; dan (3) fasilitasi proses legislasi guna mengurangi jumlah Perda yang bermasalah.

III. Sinergi dalam Kerangka Anggaran

Sinergi Pusat-Daerah dilaksanakan selaras dengan upaya penataan dan penguatan kerangka perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Salah satu kebijakan RPJMN 2010-2014 adalah restrukturisasi dan penataan instrumen pendanaan melalui transfer ke daerah termasuk dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK) dan dana bagi hasil (DBH) yang secara keseluruhan disebut dana perimbangan (DP); serta dana otonomi khusus (Dana Otsus) untuk menjaga harmonisasi kepentingan nasional dan kebutuhan daerah.

Dalam lima tahun mendatang pengelolaan dana perimbangan dan dana otonomi khusus diarahkan untuk: (1) meningkatkan kapasitas fiskal daerah dan mengurangi kesenjangan fiskal antara pusat dan daerah dan antar daerah; (2) menyelaraskan besaran kebutuhan pendanaan di daerah dengan pembagian urusan pemerintahan; (3) meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerah dan mengurangi kesenjangan pelayanan publik antardaerah; (4) meningkatkan daya saing daerah; (5) mendukung kesinambungan fiskal nasional dalam kerangka kebijakan ekonomi makro; (6) meningkatkan kemampuan daerah dalam menggali potensi ekonomi daerah; (7) meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya nasional; dan (8) meningkatkan



sinkronisasi antara rencana pembangunan nasional dengan rencana pembangunan daerah.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas pemanfaatan DAU langkah yang akan dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah antara lain adalah untuk: (1) mewujudkan seutuhnya fungsi DAU sebagai *block grant* belanja publik pemda menurut kewenangan; (2) menyusun formulasi DAU secara komprehensif yang mampu menggambarkan seluruh fungsi daerah dalam menunjang keutuhan nasional, serta memberikan perhatian khusus kepada daerah-daerah dengan beban nasional seperti pusat prasarana vital dan strategis, pusat investasi, kawasan hutan lindung dan wilayah perbatasan yang belum diakomodasi dalam aspek legal.

Dalam upaya meningkatkan efektivitas pelaksanaan DAK, langkah yang akan ditempuh Pusat-Daerah antara lain adalah: (1) sinergi perencanaan DAK antara kementerian/lembaga dan satuan kerja perangkat daerah agar pengelolaan dan pemanfaatan DAK benar-benar mendorong peningkatan pelayanan publik di daerah dan mendukung pencapaian prioritas nasional; (2) memberi kewenangan kepada Gubernur dalam pelaksanaan DAK sehingga masuk dalam APBD, serta menjamin efektivitas program dan kelancaran pelaporan; dan (3) sinkronisasi petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang dikeluarkan kementerian/lembaga agar sesuai dengan kebutuhan daerah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan DBH dan mengurangi ketimpangan fiskal antara pemerintah pusat dan pemda, langkah yang akan ditempuh Pemerintah Pusat bersama pemerintah daerah dalam lima tahun mendatang adalah: (1) menjamin keterbukaan informasi dan data dari pusat kepada daerah; dan (2) mempercepat penyaluran DBH sumber daya alam.

Selain itu, dalam upaya menjamin efektivitas pengelolaan dan pemanfaatan dana dekonsentrasi untuk mencapai prioritas pembangunan nasional, memperkuat kapasitas pemerintah daerah, dan meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah, langkah yang akan ditempuh dalam lima tahun mendatang adalah (1) mempertegas kerangka organisasi dan personil pelaksana pemanfaatan dana dekonsentrasi; (2) sinkronisasi perencanaan program antara kementerian/lembaga dan satuan kerja perangkat daerah; dan (3) penentuan sasaran fungsional program secara bersama.

IV. Sinergi dalam Kerangka Kelembagaan dan Aparatur Daerah

Sinergi Pusat-Daerah dalam bidang pemerintahan akan diarahkan untuk memperbaiki tata kelola kelembagaan pemerintahan daerah dan meningkatkan kapasitas aparatur daerah. Dalam upaya memperbaiki tata kelola pemerintahan daerah, upaya yang akan dilakukan dalam lima tahun mendatang diarahkan mempercepat reformasi organisasi perangkat daerah agar mampu menyelenggarakan urusan

pemerintahan secara lebih efisien dan efektif, meningkatkan mutu dan jangkauan publik pelayanan sesuai standar pelayanan minimal (SPM) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, melaksakan kaidah penyelenggaraan pemerintahan yang baik; serta meningkatkan daya saing daerah. Sementara, upaya peningkatan kapasitas aparatur daerah diarahkan untuk menjadi aparatur yang lebih handal, kompeten dan profesional dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah.

Sinergi Pemerintah Pusat-Daerah yang akan dilakukan dalam lima tahun mendatang adalah: (1) menata dan menyempurnakan pengaturan kewenangan antartingkat pemerintahan sebagai dasar penetapan kinerja dan alokasi anggaran dengan penerapan anggaran berbasis secara bertanggung jawab; (2) mengendalikan pemekaran daerah dan memantapkan pengelolaan daerah otonom dengan tetap mengutamakan harmonisasi kepentingan nasional dan kebutuhan daerah dan rentang kendali manajemen yang ideal; serta (3) meningkatkan kapasitas aparatur yang mampu menjembatani kepentingan nasional dan daerah serta kerjasama antardaerah.

V. Sinergi dalam Kerangka Pengembangan Wilayah

Dalam mempercepat pengembangan wilayah akan dilakukan upaya untuk mendorong penataan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang dengan prinsip harmonisasi kepentingan nasional dan kebutuhan daerah serta keserasian antardaerah. Langkah yang akan ditempuh oleh Pemerintah dan pemerintah daerah dalam lima tahun mendatang adalah: (1) sinkronisasi kebijakan dalam penggunaan lahan dan tata ruang untuk menghindari tumpang tindih kebijakan; (2) memperkuat struktur ruang serta pemanfaatan dan pengendalian ruang untuk mitigasi bencana alam; (3) meningkatkan perhatian pemda pada tata ruang; (4) mencegah ego kedaerahan untuk menghindari pembangunan prasarana dan sarana tanpa perhitungan harmonisasi wilayah pelayanan bersama-sama dengan kabupaten/kota tetangga; (5) meningkatkan pengaturan bersama alih fungsi lahan melalui padu serasi dan penyelesaian segera aspek pemanfaatan ruang khususnya dengan sektor kehutanan; (6) mempercepat penyusunan peraturan pendukung pelaksanaan rencana tata ruang wilayah yang mencakup sistem tataguna lahan dan sistem transportasi; (7) mempercepat penyusunan rencana tataruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota; (8) membangun kesepakatan dalam penentuan lokasi wilayah-wilayah cepat tumbuh terutama Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

Dalam penataan pemekaran wilayah, Pemerintah Pusat-Daerah akan melakukan sinergi untuk : (1) menyusun *grand design* yang mengatur arah kebijakan dan strategi pemekaran daerah, serta proyeksi mengenai jumlah daerah otonom ideal di wilayah NKRI; (2) melakukan pengendalian dan evaluasi secara terus menerus terhadap kemampuan manajemen pemerintah dengan memperhatikan daya dukung lahan, aglomerasi, dan distribusi pendapatan; *serta* (3) revitalisasi Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD dalam melakukan pengujian kelayakan dan memberikan



pertimbangan dalam pemekaran dan/atau penggabungan daerah.

1.9. Kaidah Pelaksanaan Sinergi Pusat – Daerah dan Antardaerah

Buku III Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 Pembangunan Berdimensi Kewilayahan: Memperkuat Sinergi antara Pusat-Daerah dan Antardaerah merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Presiden hasil Pemilihan Umum tahun 2009 serta pelaksanaan salah satu misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 untuk mewujudkan pemerataan pembangunan dan pengurangan kesenjangan antarwilayah. Buku III RPJMN 2010-2014 juga disusun dengan berpedoman pada kebijakan pemanfaatan ruang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) serta disesuaikan dengan karakteristik masing-masing wilayah.

Buku III RPJMN 2010-2014 menjadi pedoman bagi Kementerian/Lembaga dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) Kementerian/Lembaga dengan memperhatikan potensi dan permasalahan wilayah serta menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Selanjutnya, Buku III RPJMN 2010-2014 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) terkait aspek kewilayahan dan bersama-sama RPJMD menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Dengan mempertimbangkan hal tersebut, disusun kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Setiap kementerian/lembaga wajib melaksanakan fokus-fokus dan kegiatan-kegiatan prioritas dalam Buku III RPJMN 2010-2014.
2. Dalam menyusun rencana strategis yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, fokus dan kegiatan prioritas, setiap kementerian/lembaga wajib mempertimbangkan arah kebijakan dan strategi pengembangan wilayah sebagaimana tertuang dalam Buku III RPJMN 2010-2014.
3. Dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang merupakan penjabaran visi, misi, dan program Kepala Daerah wajib mempertimbangkan arah kebijakan dan strategi pengembangan wilayah sebagaimana tertuang dalam Buku III RPJMN 2010-2014.
4. Setiap kementerian/lembaga beserta pemerintah daerah wajib menjaga konsistensi antara Buku III RPJMN 2010-2014, Rencana Strategis (Renstra) Kementerian/Lembaga 2010-2014, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
5. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan Buku III RPJMN 2010-2014, Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan

Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional wajib melakukan koordinasi dan konsultasi untuk menjamin sinergitas pelaksanaan fokus-fokus dan kegiatan-kegiatan prioritas oleh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.

6. Pelaksanaan fokus-fokus dan kegiatan prioritas dalam Buku III RPJMN 2010-2014 dilakukan melalui sinergi kegiatan antarkementerian/lembaga, dan Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD) berdasarkan tugas pokok dan fungsi sesuai peraturan perundangan.

Pelaksanaan fokus-fokus dan kegiatan prioritas dalam Buku III RPJMN 2010-2014 dilakukan melalui sinkronisasi pengelolaan dana dekonsentrasi dan tugas perbantuan, dana perimbangan dan dana otonomi khusus; serta investasi swasta

**MATRIKS SINKRONISASI PUSAT DAN DAERAH DALAM PENCAPAIAN PRIORITAS NASIONAL
PRIORITAS 1 : REFORMASI BIROKRASI DAN TATA KELOLA**

SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS	INSTANSI PELAKSANA	SASARAN PELAKSANAAN DI WILAYAH						
		SUMATERA	JAWA BALI	KALIMANTAN	SULAWESI	NUSA TENGGARA	MALUKU	PAPUA
Otonomi Daerah • Penataan Daerah Otonom dan Otonomi Khusus.	Kementerian Dalam Negeri	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya seluruh mekanisme pengusulan pemekaran dan penggabungan daerah sesuai dengan PP No. 78 Tahun 2007, dalam rangka penghentian/pembatasan pemekaran wilayah/pembentukan daerah otonom baru. 						
Otonomi Daerah • Pembinaan dan Fasilitasi Dana Perimbangan.	Kementerian Dalam Negeri	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan efektifitas pemanfaatan DAK sesuai petunjuk pelaksanaan. • Optimalisasi penyerapan DAK oleh daerah. • Tersusunnya kebijakan/regulasi di bidang fasilitasi dana perimbangan yang dapat diimplementasikan di daerah. 						
Otonomi Daerah • Pembinaan Administrasi Anggaran Daerah.	Kementerian Dalam Negeri	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kualitas belanja daerah dalam APBD. • Penetapan APBD tepat waktu. 						
Otonomi Daerah • Pembinaan dan Fasilitasi Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah.	Kementerian Dalam Negeri	<ul style="list-style-type: none"> • Provinsi dan kabupaten/ kota memiliki Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) berstatus Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). • Meningkatnya peran provinsi melakukan fasilitasi kepada kab/kota agar kab/kota memiliki Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) berstatus Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). • Penetapan dan penyampaian Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD secara tepat waktu. 						
Otonomi Daerah • Pembinaan administrasi pejabat negara di	Kementerian Dalam Negeri	<ul style="list-style-type: none"> • Tersusunnya UU tentang PEMILU Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan terselenggaranya PILKADA yang efisien. 						

SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITYAS	INSTANSI PELAKSANA	SASARAN PELAKSANAAN DI WILAYAH						
		SUMATERA	JAWA BALI	KALIMANTAN	SULAWESI	NUSA TENGGARA	MALUKU	PAPUA
daerah dan DPRD.								
Sumberdaya Manusia • Penyusunan kebijakan perencanaan SDM aparatur.	Kemeneg PAN dan Reformasi Birokrasi							<ul style="list-style-type: none"> • Tersusunnya kebijakan (PP) tentang sistem pengadaan/rekrutmen dan seleksi PNS. • Tersusunnya kebijakan (PP) tentang kebutuhan Pegawai (Formasi).
Sumberdaya Manusia • Pengembangan Kebijakan Pematapan Pengembangan SDM Aparatur.	Kemeneg PAN dan Reformasi Birokrasi							<ul style="list-style-type: none"> • Tersusunnya kebijakan tentang manajemen kepegawaian (UU tentang SDM Apartur Negara). <ul style="list-style-type: none"> • Tersusunnya kebijakan tentang pola karir dan penilaian kinerja PNS. • Tersusunnya kebijakan tentang penilaian kinerja pegawai (SKP). • Tersusunnya kebijakan tentang penilaian, pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam jabatan struktural. <ul style="list-style-type: none"> • Tersusunnya kebijakan diklat jabatan PNS. • Tersusunnya kebijakan tentang pengangkatan PNS dalam jabatan struktural. • Tersusunnya kebijakan tentang manajemen kepegawaian (UU tentang SDM Aparatur Negara). <ul style="list-style-type: none"> • Tersusunnya kebijakan tentang pola karir dan penilaian kinerja PNS. • Tersusunnya kebijakan tentang penilaian kinerja pegawai (SKP).
Sumberdaya Manusia • Pengembangan Kebijakan Kesejahteraan SDM Aparatur.	Kemeneg PAN dan Reformasi Birokrasi							<ul style="list-style-type: none"> • Tersusunnya kebijakan (UU/PP) tentang remunerasi dan tunjangan kinerja Pegawai Negeri. <ul style="list-style-type: none"> • Tersusunnya kebijakan sistem pensiun PNS. • Tersusunnya kebijakan tentang sistem pengelolaan dana pensiun PNS.

SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS	INSTANSI PELAKSANA	SASARAN PELAKSANAAN DI WILAYAH						
		SUMATERA	JAWA BALI	KALIMANTAN	SULAWESI	NUSA TENGGARA	MALUKU	PAPUA
Sumberdaya Manusia • Pendidikan dan pelatihan Bidang Pemerintahan dan Politik.	Kementerian Dalam Negeri	• Terintegrasinya seluruh diklat bagi PNS Daerah untuk menunjang penyelenggaraan pemerintah, politik dan penerapan SPM di daerah.						
Regulasi • Penataan Urusan Pemerintahan Daerah dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.	Kementerian Hukum dan HAM	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya keharmonisan rancangan peraturan perundang-undangan tingkat pusat bidang politik, hukum, keamanan, keuangan, perbankan, industri, perdagangan, sumber daya alam, riset, teknologi, dan kesejahteraan rakyat. • Meningkatnya pemetaan terhadap publikasi peraturan perundang-undangan daerah oleh pemda dalam sistem informasi yang akurat dan <i>up to date</i>. 						
Regulasi • Penataan Produk Hukum dan Pelayanan Bantuan Hukum Departemen.	Kementerian Dalam Negeri	• Percepatan harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan di tingkat pusat dan daerah hingga tercapai keselarasan arah dalam implementasi pembangunan.						
Sinergitas Pusat dan Daerah • Pengembangan Kapasitas dan Evaluasi Kinerja Daerah.	Kementerian Dalam Negeri	<ul style="list-style-type: none"> • Tersusunnya SPM Bidang lainnya yang belum diterbitkan sampai dengan akhir tahun 2009. • Meningkatnya implementasi urusan pemerintahan daerah dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di daerah. 						
Sinergitas Pusat dan Daerah • Koordinasi perencanaan dan evaluasi program pelayanan publik.	Kemeng PAN dan Reformasi Birokrasi	• Tersusunnya peraturan pelaksanaan dari UU No. 25/2009 tentang Pelayanan Publik.						
Sinergitas Pusat dan Daerah • Peningkatan koordinasi dan evaluasi	Kemeng PAN dan Reformasi Birokrasi	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya penilaian, monitoring dan evaluasi pelayanan publik. • Tersusunnya kebijakan percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik. 						

SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITYAS	INSTANSI PELAKSANA	SASARAN PELAKSANAAN DI WILAYAH						
		SUMATERA	JAWA BALI	KALIMANTAN	SULAWESI	NUSA TENGGARA	MALUKU	PAPUA
pelayanan di bidang kesejahteraan sosial.		<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya asistensi untuk mendorong penerapan pelayanan satu pintu (OSS). 						
		<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya kompetisi antar unit pelayanan publik, dan antar instansi dan pemerintah daerah. 						
Penegakan Hukum <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan integrasi dan integritas penerapan dan penegakan hukum oleh seluruh lembaga dan aparat hukum. 	Kepolisian Negara RI	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya <i>clearance rate</i> tindak pidana di tingkat masyarakat. 						
	Kejaksaan RI	<ul style="list-style-type: none"> • Tersusunnya rencana peningkatan SDM penyidik dan penuntut di kejaksaan. • Terlaksananya pelatihan teknis penyidik dan penuntut di kejaksaan. 						
	Komisi Pemberantasan Korupsi	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan pengembalian kerugian negara dari hasil eksekusi perkara yang telah inkrach. • Terlaksananya penanganan perkara TPK oleh APGAKUM yang disupervisi oleh KPK. • Terlaksananya penindakan kasus korupsi dan pemberantasan mafia hukum dan mafia kasus yang melibatkan personil KPK. <ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya penyelamatan aset/kekayaan negara melalui pencegahan TPK yang komprehensif dan integratif. <ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya monitoring penyelenggaraan pemerintahan negara. • Terbentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi/Satgas KPK di 33 Provinsi sampai dengan tahun 2014. 						
	Mahkamah Agung RI	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya kinerja hakim dan aparat peradilan. • Terlaksananya penerapan SKMA Nomor 144 untuk meningkatkan kepercayaan publik kepada lembaga peradilan sampai dengan tahun 2014. <ul style="list-style-type: none"> • Terbentuknya dan beroperasinya pengadilan tindak pidana korupsi pada 33 Provinsi sampai tahun 2014. 						
Data Kependudukan <ul style="list-style-type: none"> • Pengelolaan informasi manajemen 	Kementerian Dalam Negeri	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya tertib administrasi kependudukan dengan tersediannya data dan informasi penduduk yang akurat dan terpadu. 						

SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS	INSTANSI PELAKSANA	SASARAN PELAKSANAAN DI WILAYAH						
		SUMATERA	JAWA BALI	KALIMANTAN	SULAWESI	NUSA TENGGARA	MALUKU	PAPUA
kependudukan.								

**MATRIKS SINKRONISASI PUSAT DAN DAERAH DALAM PENCAPAIAN PRIORITAS NASIONAL
PRIORITAS 2 : PENDIDIKAN**

SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS	INSTANSI PELAKSANA	SASARAN PELAKSANAAN DI WILAYAH						
		SUMATERA	JAWA BALI	KALIMANTAN	SULAWESI	NUSA TENGGARA	MALUKU	PAPUA
Akses Pendidikan Dasar Menengah • Peningkatan APM Pendidikan Dasar, Menengah dan SMA.	Kementerian Pendidikan Nasional Kementerian Agama	• APM pendidikan dasar menjadi 96% pada	• APM pendidikan dasar menjadi 96% pada	• APM pendidikan dasar menjadi 96% pada tahun	• APM pendidikan dasar menjadi 96% pada tahun	• APM pendidikan dasar menjadi 96% pada tahun 2014. • APM pendidikan	• APM pendidikan dasar menjadi 96% pada tahun	• APM pendidikan dasar menjadi 96% pada tahun

SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS	INSTANSI PELAKSANA	SASARAN PELAKSANAAN DI WILAYAH						
		SUMATERA	JAWA BALI	KALIMANTAN	SULAWESI	NUSA TENGGARA	MALUKU	PAPUA
		tahun 2014. <ul style="list-style-type: none"> • APM pendidikan setingkat SMP menjadi 75%-80% di 2014. • APK pendidikan setingkat SMA menjadi 75%-85% di 2014. 	tahun 2014. <ul style="list-style-type: none"> • APM pendidikan setingkat SMP menjadi 80%-90% di 2014. • APK pendidikan setingkat SMA menjadi 80%-90% di 2014. 	2014. <ul style="list-style-type: none"> • APM pendidikan setingkat SMP menjadi 72%-77% di 2014. • APK pendidikan setingkat SMA menjadi 75%-85% di 2014. 	2014. <ul style="list-style-type: none"> • APM pendidikan setingkat SMP menjadi 73%-78% di 2014. • APK pendidikan setingkat SMA menjadi 75%-85% di 2014. 	setingkat SMP menjadi 70%-76% di 2014. <ul style="list-style-type: none"> • APK pendidikan setingkat SMA menjadi 70%-80% di 2014. 	2014. <ul style="list-style-type: none"> • APM pendidikan setingkat SMP menjadi 80%-90% di 2014. • APK pendidikan setingkat SMA menjadi 80%-90% di 2014. 	2014. <ul style="list-style-type: none"> • APM pendidikan setingkat SMP menjadi 70%-76% di 2014. • APK pendidikan setingkat SMA menjadi 70%-80% di 2014.
Akses Pendidikan Dasar Menengah <ul style="list-style-type: none"> • Pemantapan/ rasionalisasi implementasi BOS. 	Kementerian Pendidikan Nasional Kementerian Agama	<ul style="list-style-type: none"> • Implementasi BOS. 						
Akses Pendidikan Dasar Menengah <ul style="list-style-type: none"> • Penurunan harga buku standar di tingkat sekolah dasar dan menengah. 	Kementerian Pendidikan Nasional Kementerian Agama	<ul style="list-style-type: none"> • Menurunnya harga buku standar di tingkat sekolah dasar dan menengah sebesar 30%-50% selambat-lambatnya tahun 2012. 						

SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS	INSTANSI PELAKSANA	SASARAN PELAKSANAAN DI WILAYAH						
		SUMATERA	JAWA BALI	KALIMANTAN	SULAWESI	NUSA TENGGARA	MALUKU	PAPUA
<p>Akses Pendidikan Dasar Menengah</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan sambungan internet ber-content pendidikan ke sekolah tingkat menengah selambat-lambatnya 2012 dan terus diperluas ke tingkat sekolah dasar. 	<p>Kementerian Pendidikan Nasional Kementerian Agama</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Tersediannya sambungan internet ber-content pendidikan ke sekolah tingkat menengah selambat-lambatnya 2012 dan terus diperluas ke tingkat sekolah dasar. 						
<p>Akses Pendidikan Tinggi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan APK Pendidikan Tinggi. 	<p>Kementerian Pendidikan Nasional Kementerian Agama</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya APK pendidikan tinggi menjadi 19%-25% di 2014. 	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya APK pendidikan tinggi menjadi 20%-30% di 2014. 	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya APK pendidikan tinggi menjadi 15%-25% di 2014. 	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya APK pendidikan tinggi menjadi 15%-25% di 2014. 	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya APK pendidikan tinggi menjadi 15%-20% di 2014. 	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya APK pendidikan tinggi menjadi 23%-27% di 2014. 	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya APK pendidikan tinggi menjadi 15%-25% di 2014.
<p>Metodologi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penyesuaian sistem Ujian Akhir Nasional pada 2011. 	<p>Kementerian Pendidikan Nasional</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Terselenggaranya penyesuaian sistem Ujian Akhir Nasional pada 2011. 						
<p>Metodologi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penyempurnaan kurikulum sekolah dasar-menengah sebelum 	<p>Kementerian Pendidikan Nasional</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Terselenggaranya penyempurnaan kurikulum sekolah dasar-menengah sebelum tahun 2011 yang diterapkan di 25% sekolah pada 2012 dan 100% pada 2014. 						

SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS	INSTANSI PELAKSANA	SASARAN PELAKSANAAN DI WILAYAH						
		SUMATERA	JAWA BALI	KALIMANTAN	SULAWESI	NUSA TENGGARA	MALUKU	PAPUA
tahun 2011 yang diterapkan di 25% sekolah pada 2012 dan 100% pada 2014.								
Pengelolaan <ul style="list-style-type: none"> • Pemberdayaan peran Kepala Sekolah sebagai manager sistem pendidikan yang unggul. 	Kementerian Pendidikan Nasional Kementerian Agama							<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya peran Kepala Sekolah sebagai manajer sistem pendidikan yang unggul.
Pengelolaan <ul style="list-style-type: none"> • Revitalisasi peran Pengawas Sekolah sebagai entitas <i>quality assurance</i>. 	Kementerian Pendidikan Nasional Kementerian Agama							<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya peran Pengawas Sekolah sebagai entitas <i>quality assurance</i>.
Pengelolaan <ul style="list-style-type: none"> • Mendorong aktivasi peran Komite Sekolah untuk menjamin keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses pembelajaran. 	Kementerian Pendidikan Nasional Kementerian Agama							<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya komite sekolah yang aktif untuk menjamin keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses pembelajaran.

SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS	INSTANSI PELAKSANA	SASARAN PELAKSANAAN DI WILAYAH						
		SUMATERA	JAWA BALI	KALIMANTAN	SULAWESI	NUSA TENGGARA	MALUKU	PAPUA
Pengelolaan <ul style="list-style-type: none"> • Mendorong aktivasi peran dewan pendidikan di tingkat kabupaten. 	Kementerian Pendidikan Nasional	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya dewan pendidikan yang aktif di tingkat kabupaten. 						
Kurikulum <ul style="list-style-type: none"> • Penataan ulang kurikulum sekolah yang dibagi menjadi kurikulum tingkat nasional, daerah, dan sekolah dengan memasukkan pendidikan kewirausahaan. 	Kementerian Pendidikan Nasional	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya penataan ulang kurikulum sekolah yang dibagi menjadi kurikulum tingkat nasional, daerah, dan sekolah dengan memasukkan pendidikan kewirausahaan. 						
Kualitas <ul style="list-style-type: none"> • Program remediasi kemampuan mengajar guru. 	Kementerian Pendidikan Nasional Kementerian Agama	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya Program Remediasi Kemampuan Mengajar Guru. 						
Kualitas <ul style="list-style-type: none"> • Penerapan sistem evaluasi kinerja profesional tenaga pengajar. 	Kementerian Pendidikan Nasional Kementerian Agama	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya penerapan sistem evaluasi kinerja profesional tenaga pengajar. 						

SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS	INSTANSI PELAKSANA	SASARAN PELAKSANAAN DI WILAYAH						
		SUMATERA	JAWA BALI	KALIMANTAN	SULAWESI	NUSA TENGGARA	MALUKU	PAPUA
Kualitas • Sertifikasi ISO 9001:2008.	Kementerian Pendidikan Nasional Kementerian Agama	• Terlaksananya Sertifikasi ISO 9001:2008 di 100% PTN, 50% PTS, dan 100% SMK sebelum 2014.						
Kualitas • Peningkatan kerjasama PTN dengan lembaga pendidikan internasional.	Kementerian Pendidikan Nasional Kementerian Agama	• Meningkatnya kerjasama PTN dengan lembaga pendidikan internasional.						
Kualitas • Mendorong 11 PT masuk Top 500 THES pada 2014.	Kementerian Pendidikan Nasional	• 2 PT.	• 6 PT.	• 1 PT.	• 1 PT.	• Peningkatan ketersediaan dan kualitas PT.	• 1 PT	• Peningkatan ketersediaan dan kualitas PT.
Kualitas • Peningkatan perbandingan guru:murid.	Kementerian Pendidikan Nasional Kementerian Agama	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya perbandingan guru:murid. <ul style="list-style-type: none"> • SD/MI 1:32. • SMP/MTs1:40. 						
Kualitas • Memastikan tercapainya Standar	Kementerian Pendidikan Nasional	• Memastikan tercapainya Standar Nasional Pendidikan (SNP) bagi Pendidikan Agama dan Keagamaan paling lambat tahun 2013.						

SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS	INSTANSI PELAKSANA	SASARAN PELAKSANAAN DI WILAYAH						
		SUMATERA	JAWA BALI	KALIMANTAN	SULAWESI	NUSA TENGGARA	MALUKU	PAPUA
Nasional Pendidikan (SNP) bagi Pendidikan Agama dan Keagamaan paling lambat tahun 2013.	Kementerian Agama							

**MATRIKS SINKRONISASI PUSAT DAN DAERAH DALAM PENCAPAIAN PRIORITAS NASIONAL
PRIORITAS 3 : KESEHATAN**

SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS	INSTANSI PELAKSANA	SASARAN PELAKSANAAN DI WILAYAH						
		SUMATERA	JAWA BALI	KALIMANTAN	SULAWESI	NUSA TENGGARA	MALUKU	PAPUA
Kesehatan Masyarakat	Kementerian Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> • Menurunnya tingkat kematian ibu di regional mengacu pada sasaran nasional, yaitu 118 per 100.000 kelahiran hidup. 						

SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS	INSTANSI PELAKSANA	SASARAN PELAKSANAAN DI WILAYAH						
		SUMATERA	JAWA BALI	KALIMANTAN	SULAWESI	NUSA TENGGARA	MALUKU	PAPUA
<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan anak. 		<ul style="list-style-type: none"> • Menurunnya tingkat kematian bayi di regional mencapai sasaran nasional (24 per 1.000 kelahiran hidup), khusus DIY <19 per 1.000 kelahiran hidup. 						
Kesehatan Masyarakat <ul style="list-style-type: none"> • Pemberian imunisasi dasar kepada balita. 	Kementerian Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> • Cakupan imunisasi di tingkat regional harus mencapai sasaran nasional sebesar 90% pada tahun 2014. 						
Kesehatan Masyarakat <ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan akses sumber air bersih. 	Kementerian Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya akses air bersih di tingkat regional hingga mencapai sasaran nasional sebesar 67%, khusus DIY >78%. 						
	Kementerian PU	<ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya akses minum di tingkat regional hingga mencapai sasaran nasional sebesar 67%, khusus DIY >78%. 						
	Kementerian PU	<ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya akses minum di tingkat regional hingga mencapai sasaran nasional sebesar 67%, khusus DIY >78%. 						
Kesehatan Masyarakat <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan akses sanitasi dasar berkualitas. 	Kementerian PU	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya akses sanitasi dasar di tingkat regional (terutama di Ibukota Provinsi) hingga mencapai sasaran nasional sebesar 75% penduduk sebelum tahun 2014. 						
	Kementerian Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya akses sanitasi dasar di tingkat regional hingga mencapai sasaran nasional sebesar 75% penduduk sebelum tahun 2014. 						

SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS	INSTANSI PELAKSANA	SASARAN PELAKSANAAN DI WILAYAH						
		SUMATERA	JAWA BALI	KALIMANTAN	SULAWESI	NUSA TENGGARA	MALUKU	PAPUA
Sarana Kesehatan <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kualitas layanan rumah sakit berakreditasi internasional. 	Kementerian Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan kualitas layanan rumah sakit berakreditasi internasional di Medan (Sumatera Utara). 	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya kualitas layanan rumah sakit berakreditasi internasional di DKI Jakarta, DIY, Denpasar. 		<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan kualitas layanan rumah sakit berakreditasi internasional di Makasar (Sulawesi Selatan). 			
Obat <ul style="list-style-type: none"> • Pemberlakuan Daftar Obat Esensial Nasional (DOEN) sebagai dasar pengadaan obat di seluruh Indonesia dan pembatasan harga obat generik bermerek pada tahun 2010. 	Kementerian Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> • Pemberlakuan DOEN akan diterapkan secara nasional. 						
Asuransi Kesehatan Nasional <ul style="list-style-type: none"> • Perluasan asuransi kesehatan 	Kementerian Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> • 100% keluarga miskin memperoleh pelayanan asuransi pada 2011. • Secara bertahap seluruh keluarga Indonesia mendapatkan pelayanan asuransi antara tahun 2012-2014. 						

SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS	INSTANSI PELAKSANA	SASARAN PELAKSANAAN DI WILAYAH						
		SUMATERA	JAWA BALI	KALIMANTAN	SULAWESI	NUSA TENGGARA	MALUKU	PAPUA
nasional melalui: i) pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat miskin; ii) pelayanan kesehatan rujukan bagi masyarakat miskin; iii) pembinaan, pengembangan pembiayaan dan jaminan pemeliharaan kesehatan.								
<p>Keluarga Berencana</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kualitas dan jangkauan layanan KB melalui klinik pemerintah dan swasta melalui: pengembangan Kebijakan dan Pembinaan kesertaan ber KB. 	BKKBN Kementerian Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> • 23.500 klinik KB pemerintah dan swasta di 33 provinsi melayani KB. • 23.500 klinik KB pemerintah dan swasta di 33 provinsi mendapatkan dukungan sarana dan prasarana. 						
<p>Pengendalian Penyakit Menular</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penurunan prevalensi Tuberculosis dari 235 menjadi 224 per 100.000 penduduk. • Penurunan kasus malaria 	Kementerian Kesehatan	Menurunnya angka kesakitan akibat penyakit menular pada 2014, yang ditandai dengan:	Menurunnya angka kesakitan akibat penyakit menular pada 2014, yang ditandai dengan:	Menurunnya angka kesakitan akibat penyakit menular pada 2014, yang ditandai dengan:	Menurunnya angka kesakitan akibat penyakit menular pada 2014, yang ditandai dengan:	Menurunnya angka kesakitan akibat penyakit menular pada 2014, yang ditandai dengan:	Menurunnya angka kesakitan akibat penyakit menular pada 2014, yang ditandai dengan:	Menurunnya angka kesakitan akibat penyakit menular pada 2014, yang ditandai dengan:
		• Menurunnya	• Menurunnya	• Menurunnya	• Menurunnya	• Menurunnya	• Menurunnya	• Menurunnya

SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS	INSTANSI PELAKSANA	SASARAN PELAKSANAAN DI WILAYAH						
		SUMATERA	JAWA BALI	KALIMANTAN	SULAWESI	NUSA TENGGARA	MALUKU	PAPUA
<p>(Annual Parasite Index-API) dari 2 menjadi 1 per 1.000 penduduk.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengendalian prevalensi HIV pada populasi dewasa (persen) hingga menjadi < 0,5. 		<ul style="list-style-type: none"> • Menurunnya prevalensi Tuberculosis dari 235 menjadi 224 per 100.000 penduduk. • Menurunnya kasus malaria (Annual Parasite Index-API) di bawah 0,4 per 1000 penduduk (khusus Jatim dibawah 0.18 per 1000 penduduk). • Terkendalnya prevalensi HIV pada populasi dewasa (persen) hingga menjadi < 0,5 	<p>prevalensi Tuberculosis dari 235 menjadi 224 per 100.000 penduduk.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menurunnya kasus malaria (Annual Parasite Index-API) di bawah 0,4 per 1000 penduduk (khusus Jatim dibawah 0.18 per 1000 penduduk). • Terkendalnya prevalensi HIV pada populasi dewasa (persen) hingga menjadi < 0,5 	<p>prevalensi Tuberculosis dari 235 menjadi 224 per 100.000 penduduk.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menurunnya kasus malaria (Annual Parasite Index-API) dari 2 menjadi 1 per 1.000 penduduk. • Terkendalnya prevalensi HIV pada populasi dewasa (persen) hingga menjadi < 0,5. 	<ul style="list-style-type: none"> • Menurunnya prevalensi Tuberculosis dari 235 menjadi 224 per 100.000 penduduk. • Menurunnya kasus malaria (Annual Parasite Index-API) dari 2 menjadi 224 per 100.000 penduduk. • Menurunnya kasus malaria (Annual Parasite Index-API) dari 2 menjadi 1 per 1.000 penduduk. • Terkendalnya prevalensi HIV pada populasi dewasa (persen) hingga menjadi < 0,5. 	<p>prevalensi Tuberculosis dari 235 menjadi 224 per 100.000 penduduk.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menurunnya kasus malaria (Annual Parasite Index-API) dari 2 menjadi 1 per 1.000 penduduk. • Terkendalnya prevalensi HIV pada populasi dewasa (persen) hingga menjadi < 0,5. 	<ul style="list-style-type: none"> • Menurunnya prevalensi Tuberculosis dari 235 menjadi 224 per 100.000 penduduk. • Menurunnya kasus malaria (Annual Parasite Index-API) dari 2 menjadi 1 per 1.000 penduduk. • Terkendalnya prevalensi HIV pada populasi dewasa (persen) hingga menjadi < 0,5. 	<p>prevalensi Tuberculosis dari 235 menjadi 224 per 100.000 penduduk.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menurunnya kasus malaria (Annual Parasite Index-API) dari 2 menjadi 1 per 1.000 penduduk. • Terkendalnya prevalensi HIV pada populasi dewasa (persen) hingga menjadi < 0,5.

SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS	INSTANSI PELAKSANA	SASARAN PELAKSANAAN DI WILAYAH						
		SUMATERA	JAWA BALI	KALIMANTAN	SULAWESI	NUSA TENGGARA	MALUKU	PAPUA
		(persen) hingga menjadi < 0,5.			(persen) hingga menjadi < 0,5.		(persen) hingga menjadi < 0,5.	
Perbaiki Gizi <ul style="list-style-type: none"> • Penurunan prevalensi kekurangan gizi (terdiri dari gizi-kurang dan gizi-buruk) pada anak balita dari 18,4 menjadi <15 persen pada 2014. 	Kementerian Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> • Menurunnya prevalensi kekurangan gizi (terdiri dari gizi-kurang dan gizi-buruk) pada anak balita dari 18,4 menjadi <15 persen pada 2014. 	<ul style="list-style-type: none"> • Menurunnya prevalensi kekurangan gizi (terdiri dari gizi-kurang dan gizi-buruk) pada anak balita dari 18,4 menjadi <14 persen pada 2014, khusus DIY dibawah 10%. 	<ul style="list-style-type: none"> • Menurunnya prevalensi kekurangan gizi (terdiri dari gizi-kurang dan gizi-buruk) pada anak balita dari 18,4 menjadi <15 persen pada 2014. 	<ul style="list-style-type: none"> • Menurunnya prevalensi kekurangan gizi (terdiri dari gizi-kurang dan gizi-buruk) pada anak balita dari 18,4 menjadi <15 persen pada 2014. 	<ul style="list-style-type: none"> • Menurunnya prevalensi kekurangan gizi (terdiri dari gizi-kurang dan gizi-buruk) pada anak balita dari 18,4 menjadi <15 persen pada 2014. 	<ul style="list-style-type: none"> • Menurunnya prevalensi kekurangan gizi (terdiri dari gizi-kurang dan gizi-buruk) pada anak balita dari 18,4 menjadi <15 persen pada 2014. 	<ul style="list-style-type: none"> • Menurunnya prevalensi kekurangan gizi (terdiri dari gizi-kurang dan gizi-buruk) pada anak balita dari 18,4 menjadi <15 persen pada 2014.

**MATRIKS SINKRONISASI PUSAT DAN DAERAH DALAM PENCAPAIAN PRIORITAS NASIONAL
PRIORITAS 4 : PENANGGULANGAN KEMISKINAN**

SUBSTANSI INTI /KEGIATAN PRIORITAS	INSTANSI PELAKSANA	SASARAN PELAKSANAAN DI WILAYAH						
		SUMATERA	JAWA BALI	KALIMANTAN	SULAWESI	NUSA TENGGARA	MALUKU	PAPUA
Penanggulangan Kemiskinan • Integrasi program perlindungan sosial berbasis keluarga (PKH, bantuan pangan, jamkesmas, beasiswa anak keluarga berpendapatan rendah, PAUD).	Koordinator: Kantor Wapres, K/L pelaksana: Perum Bulog Kementerian Pendidikan Nasional Kementerian Agama Kementerian Kesehatan Kementerian Sosial Kementerian Komunikasi	<ul style="list-style-type: none"> • Asuransi kesehatan nasional bagi penduduk miskin, sasarannya ditetapkan berdasarkan data BPS. • Bantuan pangan. • Beasiswa anak berpendapatan rendah. • PAUD. 						
		• Pilot PKH di NAD, Sumut dan Sumbar pada 82 kecamatan.	• Pilot PKH (***) di DKI, Banten, DIY dan Jatim pada 537 kecamatan. Perluasan mulai	• Pilot PKH di Kalsel 37 kecamatan Perluasan mulai	• Pilot PKH di Sulut dan Gorontalo 64 kecamatan. Perluasan	• Pilot PKH di NTB 61 kecamatan. Perluasan mulai 2011.	• Pilot PKH Akan dimulai 2011 di kecamatan perkotaan lebih	• Pilot PKH Akan dimulai 2011 di kecamatan perkotaan lebih

SUBSTANSI INTI /KEGIATAN PRIORITAS	INSTANSI PELAKSANA	SASARAN PELAKSANAAN DI WILAYAH						
		SUMATERA	JAWA BALI	KALIMANTAN	SULAWESI	NUSA TENGGARA	MALUKU	PAPUA
	dan Informatika PT Pos	Perluasan mulai 2011.	2011.	2011.	mulai 2011.		dulu.	dulu.
Penanggulangan Kemiskinan • Penambahan anggaran PNPM Mandiri dari Rp. 10,3 T pada tahun 2009 menjadi Rp. 12,1 T pada tahun 2010*)	Kementerian Dalam Negeri Kementerian PU Kemeneg Daerah Tertinggal	• Anggaran PNPM Rp. 3,45 T untuk 1.783 kecamatan.	• Anggaran PNPM Rp. 4,28 T untuk 1.967 kecamatan.	• Anggaran PNPM Rp. 0,79 T untuk 574 kecamatan.	• Anggaran PNPM Rp. 1,67 T untuk 904 kecamatan.	• Anggaran PNPM Rp. 0,96 T untuk 393 kecamatan.	• Anggaran PNPM Rp. 0,21 T untuk 192 kecamatan.	• Anggaran PNPM Rp. 0,73 T untuk 508 kecamatan.
	Kementerian Kelautan dan Perikanan	• Meningkatnya keberdayaan dan kemandirian 2 juta usaha skala mikro di seluruh kawasan minapolitan pesisir, beroperasinya sarana usaha mikro.						
Penanggulangan Kemiskinan • Bantuan Sosial Terpadu	BPN	• Terlaksananya redistribusi tanah						

Keterangan:

*) Buku Daftar Lokasi dan Alokasi BLM PNPM 2010 Mandiri sudah diedarkan oleh Menko Kesra melalui surat No. S-114/Set/TP-PNPM/XI/2009.

***) Rp. 9,9 T berupa APBN untuk BLM dan Rp. 2,2 berupa Pendampingan/TA (fasilitator dan biaya operasionalnya). Belum termasuk APBD yang senilai Rp. 2,63 T (BLM)

***) Untuk PKH perluasan akan dilakukan mempertimbangkan kesiapan/ketersediaan fasilitas pendidikan dan kesehatan yang layak.

**MATRIKS SINKRONISASI PUSAT DAN DAERAH DALAM PENCAPAIAN PRIORITAS NASIONAL
PRIORITAS 5 : KETAHANAN PANGAN**

SUBSTANSI INTI/KEGIATAN PRIORITAS	INSTANSI PELAKSANA	SASARAN PELAKSANAAN DI WILAYAH						
		SUMATERA	JAWA BALI	KALIMANTAN	SULAWESI	NUSA TENGGARA	MALUKU	PAPUA
Lahan, Pengembangan Kawasan, dan Tata Ruang Pertanian • Penataan regulasi untuk menjamin kepastian hukum atas lahan pertanian.	BPN	• Terlaksananya peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang pertanahan untuk mendukung UU No 41/2009. Wilayah-wilayah yang memenuhi kriteria yang akan ditetapkan dalam turunan UU 41/2009.						
	Kementerian Kelautan dan Perikanan	• Tersedianya rencana zonasi provinsi/kabupaten/kota, masterplan minapolitan, masterplan kluster pulau-pulau kecil bernilai ekonomi tinggi, serta <i>masterplan</i> kawasan sentra produksi kelautan.						
	Kementerian Pertanian	• Kebijakan berupa regulasi.						

SUBSTANSI INTI/KEGIATAN PRIORITAS	INSTANSI PELAKSANA	SASARAN PELAKSANAAN DI WILAYAH						
		SUMATERA	JAWA BALI	KALIMANTAN	SULAWESI	NUSA TENGGARA	MALUKU	PAPUA
<p>Lahan, Pengembangan Kawasan, dan Tata Ruang Pertanian</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan areal pertanian baru seluas 2 juta hektar. 	Kementerian Pertanian	<ul style="list-style-type: none"> • Perluasan areal pertanian (ha), NAD 100rb, Riau 120rb, Jambi 80rb, Sumsel 80rb, Lampung 80rb, Bengkulu 80rb, Sumbar 60rb. 		<ul style="list-style-type: none"> • Perluasan areal pertanian (ha), Kaltim 100rb, kalsel 100rb, kalbar 80rb, kalteng 100rb. 	<ul style="list-style-type: none"> • Perluasan areal pertanian (Ha), Sulbar 100rb, Sulsel 100rb, Sulteng 100rb, Sultra 100rb. 	<ul style="list-style-type: none"> • Perluasan areal pertanian (Ha), NTB 60rb, NTT 60rb. 	<ul style="list-style-type: none"> • Perluasan areal pertanian (Ha), Maluku 100rb, Malut 100rb). 	<ul style="list-style-type: none"> • Perluasan areal pertanian (ha), Papua 200rb, Papua Barat 100rb).
<p>Lahan, Pengembangan Kawasan, dan Tata Ruang Pertanian</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penertiban, serta optimalisasi penggunaan lahan terlantar. 	Kementerian Pertanian	<ul style="list-style-type: none"> • Terkelolanya lahan pertanian di Riau, Jambi, Sumsel, Lampung, Bengkulu, Sumbar. 	<ul style="list-style-type: none"> • Terkelolanya lahan pertanian, di Banten, Jabar, Jateng, DIY, Jatim,Bali. 	<ul style="list-style-type: none"> • Terkelolanya lahan pertanian di Kaltim, kalsel, kalbar, kalteng. 	<ul style="list-style-type: none"> • Terkelolanya lahan pertanian di Sulbar, Sulsel, Sulteng, Sultra. 	<ul style="list-style-type: none"> • Terkelolanya lahan pertanian di NTB, NTT. 	<ul style="list-style-type: none"> • Terkelolanya lahan pertanian di Maluku, Maluku Utara. 	<ul style="list-style-type: none"> • Terkelolanya lahan pertanian di Papua, Papua Barat.

SUBSTANSI INTI/KEGIATAN PRIORITAS	INSTANSI PELAKSANA	SASARAN PELAKSANAAN DI WILAYAH						
		SUMATERA	JAWA BALI	KALIMANTAN	SULAWESI	NUSA TENGGARA	MALUKU	PAPUA
Infrastruktur <ul style="list-style-type: none"> Pembangunan dan pemeliharaan sarana transportasi dan angkutan yang melayani daerah-daerah sentra produksi pertanian demi peningkatan kuantitas dan kualitas produksi serta kemampuan pemasarannya. 	Kementerian Perhubungan	<ul style="list-style-type: none"> Terselenggaranya pengadaan sarana transportasi perdesaan. 						
		<ul style="list-style-type: none"> Lokasi: Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, Riau, Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Lampung. 	<ul style="list-style-type: none"> Lokasi: Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur. 		<ul style="list-style-type: none"> Lokasi: Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Gorontalo. 	<ul style="list-style-type: none"> Lokasi: NTB, NTT. 	<ul style="list-style-type: none"> Lokasi: Maluku, Maluku Utara. 	<ul style="list-style-type: none"> Lokasi: Papua, Papua Barat.
	Kementerian Kelautan dan	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya 	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya 	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya 	<ul style="list-style-type: none"> Terwujudnya 	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya 	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya 	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya

SUBSTANSI INTI/KEGIATAN PRIORITAS	INSTANSI PELAKSANA	SASARAN PELAKSANAAN DI WILAYAH						
		SUMATERA	JAWA BALI	KALIMANTAN	SULAWESI	NUSA TENGGARA	MALUKU	PAPUA
	Perikanan	<p>pembangunan dan pencapaian standar pelayanan prima di pelabuhan perikanan dengan fasilitas penunjang produksi, pengolahan, pemasaran dan kesyahbandaran yang sesuai standar.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Terwujudnya kecukupan kapal 	<p>pembangunan dan pencapaian standar pelayanan prima di pelabuhan perikanan dengan fasilitas penunjang produksi, pengolahan, pemasaran dan kesyahbandaran yang sesuai standar.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Terwujudnya kecukupan kapal perikanan Indonesia (yang laik laut, laik tangkap, dan laik simpan), alat 	<p>pembangunan dan pencapaian standar pelayanan prima di pelabuhan perikanan dengan fasilitas penunjang produksi, pengolahan, pemasaran dan kesyahbandaran yang sesuai standar.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Terwujudnya kecukupan kapal perikanan Indonesia (yang laik laut, laik tangkap, dan laik simpan), alat 	<p>Kapal perikanan Indonesia (yang laik laut laik tangkap dan laik simpan) alat penangkap ikan (yang sesuai SNI) dan pengawakan yang memenuhi standar di setiap WPP, PPS Kendari, PPS Bitung.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Lokasi: Sulawesi 	<p>pembangunan dan pencapaian standar pelayanan prima di pelabuhan perikanan dengan fasilitas penunjang produksi, pengolahan, pemasaran dan kesyahbandaran yang sesuai standar.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Terwujudnya kecukupan kapal perikanan Indonesia (yang laik laut, laik tangkap, dan laik simpan), alat penangkapan ikan yang sesuai SNI, dan pengawakan yang memenuhi 	<p>pembangunan dan pencapaian standar pelayanan prima di pelabuhan perikanan dengan fasilitas penunjang produksi, pengolahan, pemasaran dan kesyahbandaran yang sesuai standar.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Terwujudnya kecukupan kapal 	<p>pembangunan dan pencapaian standar pelayanan prima di pelabuhan perikanan dengan fasilitas penunjang produksi, pengolahan, pemasaran dan kesyahbandaran yang sesuai standar.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Terwujudnya kecukupan kapal perikanan Indonesia (yang laik laut, laik tangkap, dan laik simpan), alat

SUBSTANSI INTI/KEGIATAN PRIORITYAS	INSTANSI PELAKSANA	SASARAN PELAKSANAAN DI WILAYAH						
		SUMATERA	JAWA BALI	KALIMANTAN	SULAWESI	NUSA TENGGARA	MALUKU	PAPUA
		<p>perikanan Indonesia (yang laik laut, laik tangkap, dan laik simpan), alat penangkapan ikan yang sesuai SNI, dan pengawakan yang memenuhi standar di setiap WPP.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lokasi: NAD, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, 	<p>penangkapan ikan yang sesuai SNI, dan pengawakan yang memenuhi standar di setiap WPP.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lokasi: Jawa Tengah, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur (Pelabuhan Perikanan Samudra dan Pelabuhan Perikanan Nusantara), dan Banten, DIY, Bali. 	<p>penangkapan ikan yang sesuai SNI, dan pengawakan yang memenuhi standar di setiap WPP.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lokasi: Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur. 	<p>Utara, Sulawesi Tenggara.</p>	<p>standar di setiap WPP.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lokasi: NTB, NTT. 	<p>perikanan Indonesia (yang laik laut, laik tangkap, dan laik simpan), alat penangkapan ikan yang sesuai SNI, dan pengawakan yang memenuhi standar di setiap WPP.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lokasi: Maluku, Maluku Utara. 	<p>penangkapan ikan yang sesuai SNI, dan pengawakan yang memenuhi standar di setiap WPP.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lokasi: Papua, Papua Barat.

SUBSTANSI INTI/KEGIATAN PRIORITAS	INSTANSI PELAKSANA	SASARAN PELAKSANAAN DI WILAYAH						
		SUMATERA	JAWA BALI	KALIMANTAN	SULAWESI	NUSA TENGGARA	MALUKU	PAPUA
		Kepri, Jambi, Sumatera Selatan, Babel, Bengkulu, Lampung.						
Infrastruktur <ul style="list-style-type: none"> Pembangunan dan pemeliharaan pengairan yang melayani daerah-daerah sentra produksi pertanian demi peningkatan kuantitas dan kualitas produksi. 	Kementerian PU	<ul style="list-style-type: none"> Pembangunan / peningkatan Jaringan Irigasi. Rehabilitasi Jaringan Irigasi. Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi. Pembangunan 	<ul style="list-style-type: none"> Pembangunan / peningkatan Jaringan Irigasi. Rehabilitasi Jaringan Irigasi. Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi. Pembangunan / peningkatan Jaringan Rawa. Rehabilitasi 	<ul style="list-style-type: none"> Pembangunan / peningkatan Jaringan Irigasi. Rehabilitasi Jaringan Irigasi. Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi. Pembangunan / peningkatan Jaringan Rawa. Rehabilitasi 	<ul style="list-style-type: none"> Pembangunan / peningkatan Jaringan Irigasi. Rehabilitasi Jaringan Irigasi. Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi. Pembangunan 	<ul style="list-style-type: none"> Pembangunan / peningkatan Jaringan Irigasi. Rehabilitasi Jaringan Irigasi. Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi. Pembangunan / peningkatan Jaringan Rawa. Rehabilitasi 	<ul style="list-style-type: none"> Pembangunan / peningkatan Jaringan Irigasi. Rehabilitasi Jaringan Irigasi. Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi. Pembangunan / peningkatan Jaringan Rawa. Pembangunan 	<ul style="list-style-type: none"> Pembangunan / peningkatan Jaringan Irigasi. Rehabilitasi Jaringan Irigasi. Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi. Pembangunan / peningkatan Jaringan Rawa. Rehabilitasi

SUBSTANSI INTI/KEGIATAN PRIORITYAS	INSTANSI PELAKSANA	SASARAN PELAKSANAAN DI WILAYAH						
		SUMATERA	JAWA BALI	KALIMANTAN	SULAWESI	NUSA TENGGARA	MALUKU	PAPUA
		<p>/ peningkatan Jaringan Rawa.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rehabilitasi Jaringan Rawa. • Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Rawa. • Pembangunan / peningkatan Jaringan Irigasi Air Tanah. • Rehabilitasi Jaringan Irigasi Air Tanah. • Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Air Tanah. • Rehabilitasi Jaringan Irigasi Air Tanah. 	<p>Jaringan Rawa.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Rawa. • Pembangunan / peningkatan Jaringan Irigasi Air Tanah. • Rehabilitasi Jaringan Irigasi Air Tanah. • Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Air Tanah. 	<p>Jaringan Rawa.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Rawa. • Pembangunan / peningkatan Jaringan Irigasi Air Tanah. • Rehabilitasi Jaringan Irigasi Air Tanah. • Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Air Tanah. 	<p>/ peningkatan Jaringan Rawa.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rehabilitasi Jaringan Rawa. • Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Rawa. • Pembangunan / peningkatan Jaringan Irigasi Air Tanah. • Rehabilitasi Jaringan Irigasi Air Tanah. • Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Air Tanah. • Rehabilitasi Jaringan Irigasi Air Tanah. 	<p>Jaringan Rawa.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Rawa. • Pembangunan / peningkatan Jaringan Irigasi Air Tanah. • Rehabilitasi Jaringan Irigasi Air Tanah. • Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Air Tanah. 	<p>/ peningkatan Jaringan Irigasi Air Tanah.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rehabilitasi Jaringan Irigasi Air Tanah. • Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Air Tanah. 	<p>Jaringan Rawa.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Rawa. • Pembangunan / peningkatan Jaringan Irigasi Air Tanah. • Rehabilitasi Jaringan Irigasi Air Tanah. • Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Air Tanah.

SUBSTANSI INTI/KEGIATAN PRIORITAS	INSTANSI PELAKSANA	SASARAN PELAKSANAAN DI WILAYAH							
		SUMATERA	JAWA BALI	KALIMANTAN	SULAWESI	NUSA TENGGARA	MALUKU	PAPUA	
		<ul style="list-style-type: none"> Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Air Tanah. 				<ul style="list-style-type: none"> Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Air Tanah. 			
	Kementerian Kelautan dan Perikanan	<ul style="list-style-type: none"> Terwujudnya kawasan perikanan budidaya yang memiliki prasarana dan sarana sesuai kebutuhan. 							
	Kementerian Pertanian	<ul style="list-style-type: none"> Pengelolaan air untuk pertanian. 							
		<ul style="list-style-type: none"> Lokasi: Riau, Jambi, Sumsel, Lampung, Bengkulu, Sumbar. 	<ul style="list-style-type: none"> Lokasi: Banten, Jabar, Jateng, DIY, Jatim, Bali. 	<ul style="list-style-type: none"> Lokasi: Kalbar, Kalteng, Kalsel, Kaltim. 	<ul style="list-style-type: none"> Lokasi: Sulbar, Sulsel, Sulteng, Sultra. 	<ul style="list-style-type: none"> Lokasi: NTB, NTT. 	<ul style="list-style-type: none"> Lokasi: Maluku, Maluku Utara. 	<ul style="list-style-type: none"> Lokasi: Papua, Papua Barat. 	
Infrastruktur <ul style="list-style-type: none"> Pembangunan dan pemeliharaan jaringan listrik yang melayani daerah-daerah sentra produksi 	Kementerian ESDM	<ul style="list-style-type: none"> Terbangunnya pembangkit dan jaringan transmisi untuk sentra produksi pertanian. 							

SUBSTANSI INTI/KEGIATAN PRIORITAS	INSTANSI PELAKSANA	SASARAN PELAKSANAAN DI WILAYAH						
		SUMATERA	JAWA BALI	KALIMANTAN	SULAWESI	NUSA TENGGARA	MALUKU	PAPUA
pertanian demi peningkatan kuantitas dan kualitas produksi.								
<p>Infrastruktur</p> <ul style="list-style-type: none"> Pembangunan dan pemeliharaan teknologi komunikasi dan sistem informasi nasional yang melayani daerah-daerah sentra produksi pertanian demi peningkatan kuantitas dan kualitas produksi serta kemampuan pemasarannya. 	Kementerian Komunikasi dan Informatika	<ul style="list-style-type: none"> Penyediaan community access point (CAP) di 130 kecamatan. Penyediaan jasa akses telekomunikasi di 13.312 desa. Penyediaan jasa akses internet di 1.251 kecamatan. Penyediaan regional 	<ul style="list-style-type: none"> Penyediaan community access point (CAP) di 92 kecamatan. Penyediaan jasa akses telekomunikasi di 4.713 desa. Penyediaan jasa akses internet di 1.273 kecamatan. Penyediaan regional internet exchange di ibukota provinsi. 	<ul style="list-style-type: none"> Penyediaan jasa akses telekomunikasi di 3.797 desa. Penyediaan jasa akses internet di 459 kecamatan. Penyediaan regional internet exchange di ibukota provinsi. 	<ul style="list-style-type: none"> Penyediaan jasa akses telekomunikasi di 3.472 desa. Penyediaan jasa akses internet di 599 kecamatan. Penyediaan regional internet 	<ul style="list-style-type: none"> Penyediaan jasa akses telekomunikasi di 2.229 desa. Penyediaan jasa akses internet di 268 kecamatan. Penyediaan regional internet exchange di ibukota provinsi. 	<ul style="list-style-type: none"> Penyediaan jasa akses telekomunikasi di 1.286 desa. Penyediaan jasa akses internet di 108 kecamatan. Penyediaan regional internet 	<ul style="list-style-type: none"> Penyediaan jasa akses telekomunikasi di 3.015 desa. Penyediaan jasa akses internet di 260 kecamatan. Penyediaan regional internet exchange di ibukota provinsi.

SUBSTANSI INTI/KEGIATAN PRIORITAS	INSTANSI PELAKSANA	SASARAN PELAKSANAAN DI WILAYAH						
		SUMATERA	JAWA BALI	KALIMANTAN	SULAWESI	NUSA TENGGARA	MALUKU	PAPUA
		internet exchange di ibukota provinsi.			exchange di ibukota provinsi.		exchange di ibukota provinsi.	
Penelitian dan Pengembangan <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan upaya penelitian dan pengembangan bidang pertanian yang mampu menciptakan benih unggul dan hasil penelitian lainnya menuju kualitas dan produktivitas hasil pertanian nasional yang tinggi. 	Kementerian Pertanian	<ul style="list-style-type: none"> • Penelitian dan Pengembangan Peternakan dan Veteriner, Lokasi: Sumut. • Penelitian dan pengembangan hortikultura, Lokasi: Sumbar. • Pelaksanaan Penelitian dan Pengkajian Teknologi Pertanian, 	<ul style="list-style-type: none"> • Penelitian dan Pengembangan Peternakan dan Veteriner, Lokasi: Jabar, Jatim. • Penelitian dan pengembangan tanaman pangan, Lokasi: Jabar, Jatim. • Penelitian dan pengembangan hortikultura, Lokasi: DKI, Jabar, Jatim. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan Penelitian dan Pengkajian Teknologi Pertanian, Lokasi: Kalbar, Kalteng, Kalsel, Kaltim. 	<ul style="list-style-type: none"> • Penelitian dan pengembangan tanaman pangan, Lokasi: Sulsel. • Penelitian dan pengembangan tanaman perkebunan, Lokasi: Sulut. • Pelaksanaan Penelitian dan Pengkajian Teknologi Pertanian, 	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan Penelitian dan Pengkajian Teknologi Pertanian, Lokasi: NTB, NTT. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan Penelitian dan Pengkajian Teknologi Pertanian, Lokasi: Maluku, Maluku Utara. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan Penelitian dan Pengkajian Teknologi Pertanian, Lokasi: Papua, Papua Barat.

SUBSTANSI INTI/KEGIATAN PRIORITYAS	INSTANSI PELAKSANA	SASARAN PELAKSANAAN DI WILAYAH						
		SUMATERA	JAWA BALI	KALIMANTAN	SULAWESI	NUSA TENGGARA	MALUKU	PAPUA
		Lokasi: NAD, Sumut, Sumbar, Riau, Jambi, Sumsel, Lampung, Babel, Bengkulu.	<ul style="list-style-type: none"> • Penelitian dan pengembangan tanaman perkebunan, Lokasi: Jabar, Jatim. • Penelitian dan pengembangan bioteknologi dan sumber daya genetik pertanian, Lokasi: Jabar. • Pengembangan Sistem Informasi dan Peningkatan sistem Pengawasan Keamanan Hayati, Lokasi: Jabar. • Penelitian dan 		Lokasi: Sulut, Sulsel.			

SUBSTANSI INTI/KEGIATAN PRIORITYAS	INSTANSI PELAKSANA	SASARAN PELAKSANAAN DI WILAYAH						
		SUMATERA	JAWA BALI	KALIMANTAN	SULAWESI	NUSA TENGGARA	MALUKU	PAPUA
			<p>pengembangan pascapanen pertanian, Lokasi: Jabar.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan Penelitian dan Pengkajian Teknologi Pertanian, Lokasi: DKI, Jabar, Jateng, DIY, Jatim, Bali, Banten. 					

SUBSTANSI INTI/KEGIATAN PRIORITAS	INSTANSI PELAKSANA	SASARAN PELAKSANAAN DI WILAYAH						
		SUMATERA	JAWA BALI	KALIMANTAN	SULAWESI	NUSA TENGGARA	MALUKU	PAPUA
	Kementerian Kelautan dan Perikanan	<ul style="list-style-type: none"> • Terwujudnya sentra produksi perikanan budidaya yang memiliki komoditas unggulan dan menerapkan teknologi inovatif. • Meningkatnya jumlah ragam dan komoditas pengembangan teknologi pengolahan, jumlah laboratorium yang menerapkan metode pengujian, serta jumlah data monitoring jaminan mutu hasil perikanan. • Terwujudnya wilayah perairan Indonesia yang teridentifikasi potensi produksi, karakteristik, kebutuhan konservasi SDInya serta jumlah inovasi teknologi dan rekomendasi pengelolaannya. • Terciptanya Hak Kekayaan Intelektual (HKI), rekomendasi, inovasi teknologi dan produk biologi yang meningkatkan efisiensi produksi, ragam, kualitas dan keamanan komoditas unggulan. • Terciptanya HKI, rekomendasi serta inovasi teknologi dan bioteknologi yang meningkatkan efisiensi pengolahan secara optimal, ragam, nilai tambah, kualitas dan keamanan produk unggulan/ prospektif. 						
	Kementerian Kehutanan	<ul style="list-style-type: none"> • Penelitian dan pengembangan Hasil Hutan. • Penelitian dan pengembangan peningkatan produktivitas Hutan. 						
	Kemeng RISTEK	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan upaya penelitian dan pengembangan bidang pertanian yang mampu menciptakan benih unggul dan hasil penelitian lainnya menuju kualitas produktivitas hasil pertanian nasional yang tinggi. 						
	LIPI	<ul style="list-style-type: none"> • Benih unggul berbasis biologi molekuler (tahan terhadap perubahan iklim). • Pupuk organik dari mikroba hayati Indonesia. • Keanekaragaman pangan (pengembangan bahan pangan nabati selain beras dan dukungan litbang untuk pengembangan peternakan). 						

SUBSTANSI INTI/KEGIATAN PRIORITAS	INSTANSI PELAKSANA	SASARAN PELAKSANAAN DI WILAYAH						
		SUMATERA	JAWA BALI	KALIMANTAN	SULAWESI	NUSA TENGGARA	MALUKU	PAPUA
		<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan fasilitas laboratorium litbang bioteknologi peternakan modern untuk mendukung perbaikan kualitas dan produktivitas bibit unggul ternak nasional. 						
	BPPT	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan Teknologi <i>Slow Release Fertilizer</i> (SRF). 						
	BATAN	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan aplikasi teknologi Isotop dan radiasi untuk menghasilkan varietas unggul tanaman pangan. 						
Investasi, Pembiayaan, dan Subsidi. <ul style="list-style-type: none"> • Dorongan untuk investasi pangan, pertanian, dan industri perdesaan berbasis produk lokal oleh pelaku usaha dan pemerintah. 	Kementerian Pertanian	Dorongan investasi untuk menunjang kegiatan : <ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan industri hilir komoditas beras, tepung Lokal, jagung, Kedelai, Buah Tropika, Biofarmaka, sawit, Kakao, Kopi, tebu, susu). 	Dorongan investasi untuk menunjang kegiatan : <ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan industri hilir komoditas beras, Tepung Lokal, jagung, Kedelai, Buah Tropika, Biofarmaka, sawit, Kakao, Kopi, tebu, susu). • Pengembangan pengolahan hasil 	Dorongan investasi untuk menunjang kegiatan : <ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan industri hilir komoditas beras, Buah Tropika, sawit, Kakao, Karet, tebu). • Pengembangan pengolahan hasil pertanian. • Pengembangan pemasaran 	Dorongan investasi untuk menunjang kegiatan : <ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan industri hilir komoditas beras, jagung, Buah Tropika, Kakao, Kopi, tebu, susu). • Pengembangan pengolahan hasil pertanian. 	Dorongan investasi untuk menunjang kegiatan : <ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan industri hilir komoditas beras, jagung, Kedelai, Kakao). • Pengembangan pengolahan hasil pertanian. • Pengembangan pemasaran internasional. 	Dorongan investasi untuk menunjang kegiatan : <ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan industri hilir komoditas biofarmaka. • Pengembangan pengolahan hasil pertanian. • Pengembangan pemasaran internasional. 	Dorongan investasi untuk menunjang kegiatan : <ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan industri hilir komoditas (sawit, kakao,karet, tebu). • Pengembangan pengolahan hasil pertanian. • Pengembangan pemasaran internasional. • Pengelolaan

SUBSTANSI INTI/KEGIATAN PRIORITAS	INSTANSI PELAKSANA	SASARAN PELAKSANAAN DI WILAYAH						
		SUMATERA	JAWA BALI	KALIMANTAN	SULAWESI	NUSA TENGGARA	MALUKU	PAPUA
		<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan pengolahan hasil pertanian. • Pengembangan pemasaran internasional. • Pengelolaan produksi tanaman serealia (padi : 79,6 jt T; Jagung: 27,2 Jt T). • Pengelolaan produksi tanaman kacang-kacangan dan umbi-umbian (Kedelai: 1,7 Jt T) 	<p>pertanian.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan pemasaran internasional. • Pengelolaan produksi tanaman serealia (padi : 192,76 jt T; Jagung: 62,55 Jt T). • Pengelolaan produksi tanaman kacang-kacangan dan umbi-umbian (Kedelai: 5,7 Jt T). • Pengelolaan Penyediaan Benih Tanaman Pangan, Hortikultur, Perkebunan dan Ternak. 	<p>internasional.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengelolaan produksi tanaman serealia (padi : 25,8 jt T; Jagung: 2,1 Jt T). • Pengelolaan produksi tanaman kacang-kacangan dan umbi-umbian (Kedelai: 0,3 Jt T). • Pengelolaan Penyediaan Benih Tanaman Pangan, Hortikultur, Perkebunan dan Ternak. • Pengembangan Sistem Agribisnis Tanaman Buah 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan pemasaran internasional. • Pengelolaan produksi tanaman serealia (padi : 41,95 jt T; Jagung: 21,4 Jt T). • Pengelolaan produksi tanaman kacang-kacangan dan umbi-umbian (Kedelai: 0,9 Jt T). • Pengelolaan Penyediaan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengelolaan produksi tanaman serealia (padi : 13,7 jt T; Jagung: 7,3 Jt T). • Pengelolaan produksi tanaman kacang-kacangan dan umbi-umbian (Kedelai: 1,03 Jt T). • Pengelolaan Penyediaan Benih Tanaman Pangan, Hortikultur, Perkebunan dan Ternak. • Pengembangan Sistem Agribisnis Tanaman Buah (Jeruk 0,2 Jt T, Mangga: 1 Jt T). 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengelolaan produksi tanaman serealia (padi Maluku-Papua : 1,5 jt T; Jagung Maluku-Papua : 0,3 jt T). • Pengelolaan produksi tanaman kacang-kacangan dan umbi-umbian (Kedelai: 0,04 Jt T). • Pengelolaan Penyediaan Benih Tanaman Pangan, 	<p>produksi tanaman serealia (padi Maluku-Papua : 1,5 jt T; Jagung Maluku-Papua : 0,3 jt T).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengelolaan produksi tanaman kacang-kacangan dan umbi-umbian (Kedelai: 0,07 Jt T). • DFI • Pengelolaan Penyediaan Benih Tanaman Pangan, Hortikultur, Perkebunan dan Ternak. • Pengembangan

SUBSTANSI INTI/KEGIATAN PRIORITAS	INSTANSI PELAKSANA	SASARAN PELAKSANAAN DI WILAYAH						
		SUMATERA	JAWA BALI	KALIMANTAN	SULAWESI	NUSA TENGGARA	MALUKU	PAPUA
		<p>T).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengelolaan Penyediaan Benih Tanaman Pangan, Hortikultur, Perkebunan dan Ternak. • Pengembangan Sistem Agribisnis Tanaman Buah (Jeruk 6,9 Jt T, Mangga: 0,7 Jt T). • Pengembangan Sistem Agribisnis Tanaman Sayuran dan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan Sistem Agribisnis Tanaman Buah (Jeruk 3,8 Jt T, Mangga: 9,5 Jt T). • Pengembangan Sistem Agribisnis Tanaman Sayuran dan Biofarmaka (bawang merah: 3,6 Jt T; Kentang: 3,3 Jt T). • Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman semusim (Tebu: 12 Jt T). • Peningkatan produksi, 	<p>(Jeruk 1,8 Jt T, Mangga: 0,2 Jt T).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman semusim. • Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman rempah dan penyegar(Kakao 0,2 Jt T). • Peningkatan produksi ternak ruminansia dengan pendayagunaan sumber daya lokal (sapi: 0,2Jt T). 	<p>Benih Tanaman Pangan, Hortikultur, Perkebunan dan Ternak.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan Sistem Agribisnis Tanaman Buah (Jeruk 2,9 Jt T, Mangga: 0,8 Jt T). • Pengembangan Sistem Agribisnis Tanaman Sayuran dan Biofarmaka (bawang merah: 0,1 Jt T; Kentang: 0,8 Jt 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan Sistem Agribisnis Tanaman Sayuran dan Biofarmaka (bawang merah: 0,05 Jt T). • Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman semusim. • Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman rempah dan penyegar(Kakao 0,1 Jt T). • Peningkatan produksi ternak ruminansia dengan pendayagunaan sumber daya lokal (sapi: 0,1Jt T). 	<p>Hortikultur, Perkebunan dan Ternak.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan Sistem Agribisnis Tanaman Buah (Jeruk 0,06 Jt T, Mangga: 0,04 Jt T). • Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman semusim. • Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu 	<p>Sistem Agribisnis Tanaman Buah (Jeruk 0,05 Jt T, Mangga: 0,03 Jt T).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman semusim. • Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman rempah dan penyegar (Kakao 0,1 Jt T). • Peningkatan produksi ternak ruminansia dengan

SUBSTANSI INTI/KEGIATAN PRIORITAS	INSTANSI PELAKSANA	SASARAN PELAKSANAAN DI WILAYAH						
		SUMATERA	JAWA BALI	KALIMANTAN	SULAWESI	NUSA TENGGARA	MALUKU	PAPUA
		<p>Biofarmaka (bawang merah: 0,2 Jt T; Kentang: 1,2 Jt T).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman semusim (Tebu: 6 Jt T). • Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman rempah dan penyegar (Kakao 1,4 Jt T). 	<p>produktivitas dan mutu tanaman rempah dan penyegar (Kakao 0,3 Jt T).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan produksi ternak ruminansia dengan pendayagunaan sumber daya lokal (sapi: 1,4Jt T). • Peningkatan produksi ternak non ruminansia dengan pendayagunaan sumber daya lokal (telur: 5 Jt T). • Peningkatan Kualitas Pelayanan karantina Pertanian. 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan produksi ternak non ruminansia dengan pendayagunaan sumber daya lokal (telur: 0,7 Jt T). • Peningkatan Kualitas Pelayanan karantina Pertanian. • Pemantapan sistem penyuluhan pertanian. • Lokasi: Kalbar, Kalteng, Kalsel, Kaltim. 	<p>T).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman semusim. • Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman rempah dan penyegar(Kakao 4,3 Jt T). • Peningkatan produksi ternak ruminansia dengan pendayagunaan 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan produksi ternak non ruminansia dengan pendayagunaan sumber daya lokal (telur: 0,3 Jt T). • Peningkatan Kualitas Pelayanan karantina Pertanian. • Pemantapan sistem penyuluhan pertanian. • Lokasi: NTB, NTT. 	<p>tanaman rempah dan penyegar(Kakao 0,2 Jt T).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan produksi ternak ruminansia dengan pendayagunaan sumber daya lokal (sapi: 0,015Jt T). • Peningkatan produksi ternak non ruminansia dengan pendayagunaan sumber daya lokal (telur: 0,03 Jt T). 	<p>pendayagunaan sumber daya lokal (sapi: 0,025Jt T).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan produksi ternak non ruminansia dengan pendayagunaan sumber daya lokal (telur: 0,02 Jt T). • Peningkatan Kualitas Pelayanan karantina Pertanian. • Pemantapan sistem penyuluhan pertanian. • Lokasi: Papua, Papua Barat.

SUBSTANSI INTI/KEGIATAN PRIORITYAS	INSTANSI PELAKSANA	SASARAN PELAKSANAAN DI WILAYAH						
		SUMATERA	JAWA BALI	KALIMANTAN	SULAWESI	NUSA TENGGARA	MALUKU	PAPUA
		<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan produksi ternak ruminansia dengan pendayagunaan sumber daya lokal (sapi: 0,5Jt T). • Peningkatan produksi ternak non ruminansia dengan pendayagunaan sumber daya lokal (telur: 1,5 Jt T). • Peningkatan Kualitas Pelayanan karantina 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemantapan sistem penyuluhan pertanian. • Lokasi: Banten, Jabar, Jateng, DIY, Jatim,Bali. 		<ul style="list-style-type: none"> • sumber daya lokal (sapi: 0,2Jt T). • Peningkatan produksi ternak non ruminansia dengan pendayagunaan sumber daya lokal (telur: 0,7 Jt T). • Peningkatan Kualitas Pelayanan karantina Pertanian. • Pemantapan sistem penyuluhan pertanian. 		<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan Kualitas Pelayanan karantina Pertanian. • Pemantapan sistem penyuluhan pertanian. • Lokasi: Maluku, Maluku Utara. 	

SUBSTANSI INTI/KEGIATAN PRIORITAS	INSTANSI PELAKSANA	SASARAN PELAKSANAAN DI WILAYAH							
		SUMATERA	JAWA BALI	KALIMANTAN	SULAWESI	NUSA TENGGARA	MALUKU	PAPUA	
		Pertanian. • Pemantapan sistem penyuluhan pertanian. • Lokasi: Sumatera Utara, Sumatera Barat, NAD, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Lampung, Kep. Bangka Belitung, Bengkulu.				• Lokasi: Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sultra, Gorontalo, Sulut.			
	Kementerian Kelautan dan Perikanan	<ul style="list-style-type: none"> • Terwujudnya kawasan potensi perikanan budidaya menjadi kawasan Minapolitan dengan usaha yang bankable. <ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan produksi perikanan budidaya dengan mutu terjamin dan data akurat. • Jumlah kawasan potensi perikanan tangkap yang menjadi kawasan Minapolitan dengan usaha yang bankable serta realisasi investasi usaha perikanan tangkap. 							

SUBSTANSI INTI/KEGIATAN PRIORITYAS	INSTANSI PELAKSANA	SASARAN PELAKSANAAN DI WILAYAH						
		SUMATERA	JAWA BALI	KALIMANTAN	SULAWESI	NUSA TENGGARA	MALUKU	PAPUA
		<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya volume produk olahan hasil perikanan dengan kemasan dan mutu terjamin. • Meningkatnya pelayanan prima dan ketertiban usaha perikanan tangkap sesuai ketersediaan SDI di setiap WPP secara akuntabel dan tepat waktu. • Meningkatnya jumlah nilai investasi (PMA dan PMDN) bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan dan jumlah unit pengolahan ikan yang memenuhi standar ketenagakerjaan. <ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya jumlah pangsa pasar ekspor perikanan. • Meningkatnya kawasan potensi perikanan yang memiliki kelompok pelaku utama yang mandiri dalam mengembangkan usaha perikanan. <ul style="list-style-type: none"> • Terselenggaranya pelatihan yang sesuai standar serta persentase lulusan yang meningkat kinerjanya sesuai standar kompetensi dan kebutuhan pasar. 						
		<ul style="list-style-type: none"> • Lokasi: NAD, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepri, Jambi, Sumatera Selatan, Babel, Bengkulu, Lampung. 	<ul style="list-style-type: none"> • Lokasi: Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Banten, DIY, DKI Jakarta. 	<ul style="list-style-type: none"> • Lokasi: Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur. 	<ul style="list-style-type: none"> • Lokasi: Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tenggara. 	<ul style="list-style-type: none"> • Lokasi: NTB. 	<ul style="list-style-type: none"> • Lokasi: Maluku, Maluku Utara. 	<ul style="list-style-type: none"> • Lokasi: Papua, Papua Barat.

SUBSTANSI INTI/KEGIATAN PRIORITAS	INSTANSI PELAKSANA	SASARAN PELAKSANAAN DI WILAYAH						
		SUMATERA	JAWA BALI	KALIMANTAN	SULAWESI	NUSA TENGGARA	MALUKU	PAPUA
	Kementerian Kehutanan	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan perencanaan pengelolaan hutan produksi. • Peningkatan tertib peredaran hasil hutan dan iuran kehutanan. <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan usaha industri primer kehutanan. • Pengembangan Perhutanan Sosial. 						
Investasi, Pembiayaan, dan Subsidi <ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan pembiayaan yang terjangkau. 	Kementerian Keuangan	<ul style="list-style-type: none"> • Pengawasan penyaluran kredit. 						
Investasi, Pembiayaan, dan Subsidi. <ul style="list-style-type: none"> • Sistem subsidi yang menjamin ketersediaan benih varietas unggul yang teruji, pupuk, teknologi dan sarana pasca panen yang sesuai secara tepat waktu, tepat jumlah, dan terjangkau. 	Kementerian Pertanian	<ul style="list-style-type: none"> • Penyaluran subsidi benih tanaman pangan. • Penyaluran pupuk bersubsidi. 						
	Kementerian Kelautan dan Perikanan	<ul style="list-style-type: none"> • Terpenuhiya kebutuhan benih untuk produksi dan pasar dengan mutu terjamin dan data akurat. 						
		<ul style="list-style-type: none"> • Lokasi: NAD, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, 	<ul style="list-style-type: none"> • Lokasi: Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Banten, DIY, DKI 	<ul style="list-style-type: none"> • Lokasi: Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan 	<ul style="list-style-type: none"> • Lokasi: Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, 	<ul style="list-style-type: none"> • Lokasi: NTB, NTT. 	<ul style="list-style-type: none"> • Lokasi: Maluku, Maluku Utara. 	<ul style="list-style-type: none"> • Lokasi: Papua, Papua Barat.

SUBSTANSI INTI/KEGIATAN PRIORITAS	INSTANSI PELAKSANA	SASARAN PELAKSANAAN DI WILAYAH						
		SUMATERA	JAWA BALI	KALIMANTAN	SULAWESI	NUSA TENGGARA	MALUKU	PAPUA
		Kepri, Jambi, Sumatera Selatan, Babel, Bengkulu, Lampung.	Jakarta.	Selatan, Kalimantan Timur.	Gorontalo, Sulawesi Tenggara.			
	Kementerian Perindustrian	<ul style="list-style-type: none"> • Revitalisasi industri pupuk dan gula. 						
	Kementerian Keuangan	<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan dan penyampaian laporan keuangan Belanja Subsidi dan Belanja Lain-lain (BSBL). • Pengelolaan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat (ABPP). 						
Pangan dan Gizi	Kementerian Pertanian	<ul style="list-style-type: none"> • Penjaminan pangan asal hewan yang aman dan halal serta pemenuhan persyaratan produk hewan non-pangan. • Pengembangan ketersediaan dan penanganan rawan pangan. • Pengembangan Sistem Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan. • Pengembangan penganeekaragaman konsumsi pangan dan peningkatan keamanan pangan segar. 						
<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kualitas gizi dan keanekaragaman pangan melalui pola pangan harapan. 	Kementerian Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> • Diharapkan prevalensi kekurangan 	<ul style="list-style-type: none"> • Diharapkan prevalensi kekurangan gizi di 	<ul style="list-style-type: none"> • Diharapkan prevalensi kekurangan gizi di 	<ul style="list-style-type: none"> • Diharapkan prevalensi kekurangan 	<ul style="list-style-type: none"> • Diharapkan prevalensi kekurangan gizi di 	<ul style="list-style-type: none"> • Diharapkan prevalensi kekurangan 	<ul style="list-style-type: none"> • Diharapkan prevalensi kekurangan gizi

SUBSTANSI INTI/KEGIATAN PRIORITYAS	INSTANSI PELAKSANA	SASARAN PELAKSANAAN DI WILAYAH						
		SUMATERA	JAWA BALI	KALIMANTAN	SULAWESI	NUSA TENGGARA	MALUKU	PAPUA
		<p>gizi di tingkat regional mencapai sasaran nasional yaitu di bawah 15%.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Upaya yang lebih keras diperlukan bagi provinsi yang masih belum mencapai target nasional, terutama NAD, Sumut, Sumbar, Riau. 	<p>tingkat regional mencapai sasaran nasional yaitu di bawah 14%, khusus DIY kurang dari 10%.</p>	<p>tingkat regional mencapai sasaran nasional yaitu di bawah 15%.</p>	<p>gizi di tingkat regional mencapai sasaran nasional yaitu di bawah 15%.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Upaya yang lebih keras diperlukan bagi provinsi yang masih belum mencapai target nasional, terutama Sulteng, Sultra, Gorontalo, 	<p>tingkat regional mencapai sasaran nasional yaitu di bawah 15%.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Upaya yang lebih keras diperlukan bagi provinsi yang masih belum mencapai target nasional, terutama NTT. 	<p>gizi di tingkat regional mencapai sasaran nasional yaitu di bawah 15%.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Upaya yang lebih keras diperlukan bagi provinsi yang masih belum mencapai target nasional, terutama Maluku. 	<p>di tingkat regional mencapai sasaran nasional yaitu di bawah 15%.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Upaya yang lebih keras diperlukan bagi provinsi yang masih belum mencapai target nasional, terutama Papua Barat.

SUBSTANSI INTI/KEGIATAN PRIORITAS	INSTANSI PELAKSANA	SASARAN PELAKSANAAN DI WILAYAH						
		SUMATERA	JAWA BALI	KALIMANTAN	SULAWESI	NUSA TENGGARA	MALUKU	PAPUA
					Sulbar.			
	Kementerian Kelautan dan Perikanan	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya unit penanganan, pengolahan dan distribusi hasil perikanan yang memperoleh sertifikasi sesuai standar nasional dan internasional. • Meningkatnya jumlah desa yang memiliki pasar yang mampu memfasilitasi penjualan hasil perikanan dan tingkat konsumsi ikan. • Meningkatnya kualitas laboratorium karantina yang sesuai standar OIE dan SNI. 						
		<ul style="list-style-type: none"> • Lokasi: NAD, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepri, Jambi, Sumatera Selatan, Babel, Bengkulu, Lampung. 	<ul style="list-style-type: none"> • Lokasi: Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Banten, DIY, DKI Jakarta. 	<ul style="list-style-type: none"> • Lokasi: Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur. 	<ul style="list-style-type: none"> • Lokasi: Gorontalo, Sulawesi Tenggara. 	<ul style="list-style-type: none"> • Lokasi: NTB, NTT. 	<ul style="list-style-type: none"> • Lokasi: Maluku. 	<ul style="list-style-type: none"> • Lokasi: Papua.
Adaptasi Perubahan Iklim <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengambilan langkah-langkah konkrit terkait adaptasi dan 	Kementerian Pertanian	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan penelitian dan pengembangan Sumberdaya Lahan Pertanian. • Peningkatan produksi ternak ruminansia dengan pendayagunaan sumber daya lokal. • Pengembangan pengelolaan lahan pertanian. 						

SUBSTANSI INTI/KEGIATAN PRIORITYAS	INSTANSI PELAKSANA	SASARAN PELAKSANAAN DI WILAYAH						
		SUMATERA	JAWA BALI	KALIMANTAN	SULAWESI	NUSA TENGGARA	MALUKU	PAPUA
antisipasi sistem pangan dan pertanian terhadap perubahan iklim.		<ul style="list-style-type: none"> Lokasi: NAD, Sumut, Sumbar, Riau, Jambi, Sumsel, Lampung, Babel, Bengkulu. 	<ul style="list-style-type: none"> Lokasi: Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DKI Jakarta, DIY, Bali, Banten. 	<ul style="list-style-type: none"> Lokasi: Kalbar, Kalteng, Kalsel, Kaltim. 	<ul style="list-style-type: none"> Lokasi: Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sultra, Gorontalo, Sulut. 	<ul style="list-style-type: none"> Lokasi: NTB, NTT. 	<ul style="list-style-type: none"> Lokasi: Maluku, Maluku Utara. 	<ul style="list-style-type: none"> Lokasi: Papua, Papua Barat.
	Kementerian Kelautan dan Perikanan	<ul style="list-style-type: none"> Terwujudnya kawasan perikanan budidaya yang sehat serta produk perikanan yang aman dikonsumsi. Meningkatnya Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) yang terjamin ketersediaan sumber daya ikan dengan data dan pengelolaan pemanfaatan yang terintegrasi, akuntabel dan tepat waktu. 						
		<ul style="list-style-type: none"> Lokasi: NAD, Sumatera Utara, 	<ul style="list-style-type: none"> Lokasi: Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, 	<ul style="list-style-type: none"> Lokasi: Kalimantan Barat, Kalimantan 	<ul style="list-style-type: none"> Lokasi: Gorontalo, Sulawesi Selatan, 	<ul style="list-style-type: none"> Lokasi: NTB, NTT. 	<ul style="list-style-type: none"> Lokasi: Maluku, Maluku Utara. 	<ul style="list-style-type: none"> Lokasi: Papua, Papua Barat.

SUBSTANSI INTI/KEGIATAN PRIORITAS	INSTANSI PELAKSANA	SASARAN PELAKSANAAN DI WILAYAH						
		SUMATERA	JAWA BALI	KALIMANTAN	SULAWESI	NUSA TENGGARA	MALUKU	PAPUA
		Sumatera Barat, Riau, Kepri, Jambi, Sumatera Selatan, Babel, Bengkulu, Lampung.	Banten, DIY, DKI Jakarta.	Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur.	Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara.			

**MATRIKS SINKRONISASI PUSAT DAN DAERAH DALAM PENCAPAIAN PRIORITAS NASIONAL
PRIORITAS 6 : INFRASTRUKTUR**

SUBSTANSI INTI/KEGIATAN PRIORITAS	INSTANSI PELAKSANA	SASARAN PELAKSANAAN DI WILAYAH						
		SUMATERA	JAWA BALI	KALIMANTAN	SULAWESI	NUSA TENGGARA	MALUKU	PAPUA

SUBSTANSI INTI/KEGIATAN PRIORITAS	INSTANSI PELAKSANA	SASARAN PELAKSANAAN DI WILAYAH						
		SUMATERA	JAWA BALI	KALIMANTAN	SULAWESI	NUSA TENGGARA	MALUKU	PAPUA
Tanah dan Tata Ruang • Konsolidasi kebijakan penanganan dan pemanfaatan tanah untuk kepentingan umum secara menyeluruh dibawah satu atap dan pengelolaan tata ruang secara terpadu.	BPN, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, Setneg, Kementerian Pertanian, Kementerian Kehutanan	• Terlaksananya sinkronisasi kebijakan terkait tata ruang dan pertanahan.						
Tanah dan Tata Ruang • Konsolidasi kebijakan penanganan dan pemanfaatan tanah untuk kepentingan umum secara menyeluruh dibawah satu atap dan pengelolaan tata ruang secara terpadu.	Kementerian Kehutanan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian ESDM, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kemeneg LH, Kementerian Nakertrans, Kementerian PU, Kemeneg PDT	• Penyusunan RPP tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan.						
Jalan • Penyelesaian pembangunan Lintas Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan, Sulawesi NTB, NTT, dan Papua sepanjang 19,370 km pada tahun	Kementerian. Perhubungan, Kementerian PU	•Terbangunnya Jalan Lintas Sumatera, sepanjang 6.081,50 km.	•Terbangunnya Jalan Lintas Jawa Bali, sepanjang 1730,7 km.	•Terbangunnya Jalan Lintas Kalimantan, sepanjang 3.331,04 km.	•Terbangunnya Jalan Lintas Sulawesi, sepanjang 3.978,34 km.	•Terbangunnya Jalan Lintas Nusa Tenggara, sepanjang 1.583,38 km.	•Terbangunnya Jalan Lintas Maluku, sepanjang 830 km.	•Terbangunnya Jalan Lintas Papua, sepanjang 1.835,16 km.

SUBSTANSI INTI/KEGIATAN PRIORITAS	INSTANSI PELAKSANA	SASARAN PELAKSANAAN DI WILAYAH						
		SUMATERA	JAWA BALI	KALIMANTAN	SULAWESI	NUSA TENGGARA	MALUKU	PAPUA
2014.								
<p>Perhubungan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan jaringan prasarana dan penyediaan sarana transportasi antar moda dan antar pulau yang terintegrasi sesuai dengan sistem transportasi nasional dan cetak biru transportasi multimoda. 	Kementerian Perhubungan	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan dan rehab jalan KA, Lokasi: di Sumatera Utara dan 1.787,5 Km di Sumatera Selatan dan 32 km jalur ganda di Sumatera Selatan. • Pembangunan Jalur Kereta Api dari Stasiun Araskabu ke Bandara Kualanamu; Pembangunan Jalur Kereta 	<ul style="list-style-type: none"> • Terbangunnya elektrifikasi jalan KA, Lokasi: di Bandung sepanjang 42 km, jalur ganda ganda Manggarai-Cikarang 34 Km, 1 paket lingkaran Jabodetabek (28,9 Km). • Terbangunnya elektrifikasi jalan KA sepanjang 68 km, Lokasi: Serpong - Maja new track, Duri - Tangerang new track, Citayam-Nambo. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan jalur kereta api Lokasi: Puruk Cahu - Bangkuang (Kalimantan Tengah). 	<ul style="list-style-type: none"> • pembangunan pelabuhan penyeberangan Lokasi: Poso (Sulteng) - Marisa (Gorontalo). 	<ul style="list-style-type: none"> • pembangunan pelabuhan penyeberangan, Lokasi: Wawerang - Baranusa dan Semau - Kupang (NTT). 	<ul style="list-style-type: none"> • pembangunan pelabuhan penyeberangan, Lokasi: Tapeleu-Kapaleo (Maluku Utara). 	<ul style="list-style-type: none"> • pembangunan pelabuhan sungai Komor dan Buagani.

SUBSTANSI INTI/KEGIATAN PRIORITYAS	INSTANSI PELAKSANA	SASARAN PELAKSANAAN DI WILAYAH						
		SUMATERA	JAWA BALI	KALIMANTAN	SULAWESI	NUSA TENGGARA	MALUKU	PAPUA
		<p>Api Tanjung Enim-Kota Padang-Pulau Baai.</p>	<ul style="list-style-type: none"> •Terbangunnya jalur ganda Lokasi: Cirebon-Kroya (segmen I dan III serta lanjutan segmen II) sepanjang 134 km; Terbangunnya jalur ganda Lintas Selatan Jawa sepanjang 76 km (Kroya - Kutoarjo); Terbangunnya jalur ganda Lintas Utara Jawa sepanjang 98 km (lanjutan Tegal - Pekalongan dan Cirebon - Brebes); Pengembangan Jaringan Kereta Api Perkotaan di Surabaya dan 					

SUBSTANSI INTI/KEGIATAN PRIORITAS	INSTANSI PELAKSANA	SASARAN PELAKSANAAN DI WILAYAH						
		SUMATERA	JAWA BALI	KALIMANTAN	SULAWESI	NUSA TENGGARA	MALUKU	PAPUA
			Bandung (elektrifikasi, jalur ganda, dll); Pembangunan Jalur Kereta Api dari Stasiun Manggarai ke Bandara Soekarno Hatta.					
		<ul style="list-style-type: none"> Pembangunan/peningkatan Pelabuhan Lokasi: a.l. Lhoksemawe, Belawan, Teluk Bayur, Dumai, Pekan Baru, Palembang, Panjang, Batam, Tg.Pinang serta pelabuhan terpilih lainnya; subsidi perintis 	<ul style="list-style-type: none"> Pembangunan/peningkatan Pelabuhan Lokasi: a.l. Tg.Priok, Tg.Emas, Tg.Perak, Bojonegara, dan Benoa serta pelabuhan terpilih lainnya. (Banten, DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Bali) 	<ul style="list-style-type: none"> Pembangunan dan Peningkatan kapasitas Pelabuhan Lokasi: a.l. Pontianak, Banjarmasin, Samarinda, Balikpapan, Tarakan serta pelabuhan terpilih lainnya. (Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan 	<ul style="list-style-type: none"> Pembangunan dan Peningkatan kapasitas Pelabuhan Lokasi: a.l. Bitung, Makassar serta pelabuhan terpilih lainnya; subsidi perintis dan PSO angkutan laut. (Sulawesi 	<ul style="list-style-type: none"> Pembangunan dan Peningkatan kapasitas Pelabuhan Lokasi: Kupang serta pelabuhan terpilih lainnya; subsidi perintis dan PSO angkutan laut. 	<ul style="list-style-type: none"> Pembangunan dan Peningkatan kapasitas Pelabuhan Lokasi: Ambon dan Ternate serta pelabuhan terpilih lainnya. 	<ul style="list-style-type: none"> Pembangunan dan Peningkatan kapasitas Pelabuhan Lokasi: Sorong, Biak, Jayapura serta pelabuhan terpilih lainnya ; 2) subsidi perintis dan PSO angkutan laut.

SUBSTANSI INTI/KEGIATAN PRIORITAS	INSTANSI PELAKSANA	SASARAN PELAKSANAAN DI WILAYAH						
		SUMATERA	JAWA BALI	KALIMANTAN	SULAWESI	NUSA TENGGARA	MALUKU	PAPUA
		dan PSO angkutan laut. (Aceh, Sumatera Utara, Riau, dan Kep. Riau)		Timur)	Selatan)			
<p>Perhubungan</p> <ul style="list-style-type: none"> Pembangunan jaringan prasarana dan penyediaan sarana transportasi antar moda dan antar pulau yang terintegrasi sesuai dengan sistem transportasi nasional dan cetak biru transportasi multimoda. 	Kementerian Perhubungan	<ul style="list-style-type: none"> Terbangunnya Bandara Kualanam; Subsidi angkutan perintis udara; Pembangunan/Rehabilitasi Bandara: Lhoksukon, Rambele, Malikussaleh, Singkil / Lae Butar, Kuala Batee, Sultan Iskandar Muda, Maimun 	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan/Rehabilitasi Bandara Husein Sastranegara, Nusawiru, Cakrabhuwana, Budiarto, Soekarno-Hatta, Halim Perdanakusuma, Adi Sumarmo, Ahmad Yani, Tunggul Wulung, Dewa Daru, Adi Sutjipto, Gading, Abdurrahman Saleh, Hadi Notonegoro, 	<ul style="list-style-type: none"> Subsidi angkutan perintis udara; Pengembangan/Rehabilitasi Supadio, Pangsuma, Rahadi Osman, Susilo, Nangapinoh, Singkawang II, Kuala Kurun, Kuala Pembuang, Tjilik Riwut, H. Asan, Iskandar, Beringin, Sanggu / Sanggo, Tumbang Samba, Syamsuddin Noor, 	<ul style="list-style-type: none"> Subsidi angkutan perintis udara; Pengembangan/Rehabilitasi Peningkatan Sam Ratulangi, Melongguane, Naha, Djalaludin, Mutiara, Bubung, Kasiguncu, Lalos, Pogogul, Syukuran Aminuddin Amir, Seko, Rampi, 	<ul style="list-style-type: none"> Subsidi angkutan perintis udara; Pengembangan/Rehabilitasi Selaparang, Brang Biji, M. Salahuddin, Lunyuk, Gewantana, Haliwen, Tardamu, Wunopito, Eltari, Mau Hau, Wai Oti, H. Hasan Aroboesman, Komodo, Mali, Rotelio (Soa), Tambolaka, Satartacik, Mbai, 	<ul style="list-style-type: none"> Subsidi angkutan perintis udara; Pengembangan/Rehabilitasi Bula, Bobong, Dobo, Falabisahaya Mangole, John Becker - Pulau Kisar, Olilit – Saumlaki, Saumlaki Baru, Wahai, Pattimura, Dominicus, Dumatubun, 	<ul style="list-style-type: none"> Subsidi angkutan perintis udara; Pengembangan/Rehabilitasi Bandara Rendani, Domine Eduard Osok, Utorom, Babo, Torea, Abresso, Merdey Bintuni, Kambuaya, Kebar, Wasior, Anggi / Iray, Ayawasi, Ijahabra, Inanwatan, Teminabuan,

SUBSTANSI INTI/KEGIATAN PRIORITYAS	INSTANSI PELAKSANA	SASARAN PELAKSANAAN DI WILAYAH						
		SUMATERA	JAWA BALI	KALIMANTAN	SULAWESI	NUSA TENGGARA	MALUKU	PAPUA
		Saleh, Cut Nyak Dhien, Lasikin, Teuku Cut Ali, Kuala Namu, Silangit, Aek Godang, Binaka, Dr Ferdinand L. Tobing, Pulau Batu / Lasondre, Sibisa, Minangkabau, Rokot, Japura, Ranai, Seipakning – Bengkulu, Sultan Syarif Kasim II, Pasir Pengaraian, Hang Nadim, Kijang, Dabo, Seibati, Hj.AS.	Kangean, Blimbingsari, Bawean, Juanda, Trunojoyo, Ngruh Rai.	Batu Licin, Tanjung Warukin, Stagen, Sepinggian, Juwata, Kalimantan, Tanjung Harapan, Temindung, Sangkulirang, Melak, Yuvai Semaring, Long Ampung, Long Layu, Dajah, Dawai, Kotabangun, Long Bawan, Malinau, Nunukan.	Soroako, Hasanuddin, Pongtiku, Andi Jemma, Tampa Padang, Tampa Padang, Wolter Monginsidi, Beto Ambari, Sugimanuru.	Lekunik.	Bandaneira, Amahai, Liwur Bunga, Namrole, Dobo, Benjina, Namlea, Sultan Babullah, Oesman Sadik, Buli, Morotai, Dofa, Kuabang, Gebe, Emalamo (Sanana).	Werur, Frans Kaisiepo, Mozes Kilangin, Sentani, Mopah, Nabire, Wamena, Moanamani, Enarotali, Bomakia, Batom, Mulia, Dekai, Kokonau, Mararena, Mindip Tanah, Waghete, Agimuga, Angguruk, Bade, Beoga, Bilai, Borme, Dabra / Dabera, Jila Jita, Kimam / Kimaan, Lereh, Modio, Molof, Pagai, Senggeh /Senggi Sinak

SUBSTANSI INTI/KEGIATAN PRIORITYAS	INSTANSI PELAKSANA	SASARAN PELAKSANAAN DI WILAYAH						
		SUMATERA	JAWA BALI	KALIMANTAN	SULAWESI	NUSA TENGGARA	MALUKU	PAPUA
		Hanandjoeddin, Depati Amir, Sultan Thaha, Depati Parbo Fatmawati Soekarno, Muko-Muko, Sultan .M. Badaruddin II, Silampari (Lubuk Linggau), Radin Inten II (Branti).						(Tapulini), Sugapa, Tiom, Ubrub, Waris, Yuruf, Bilorai, Bokondini, Elelim, Ewer, Ilaga 1 ,Kaminggaru, Ilu, Kamur, Karubaga, Kebo, Kelila, Kepi, Kiwirok, Manggelum, Obano,Okaba, Oksibil, Senggo, Elelim, Ewer, Ilaga 1 Kaminggaru, Ilu, Kamur, Karubaga, Kebo, Kelila, Kepi, Kiwirok, Manggelum,

SUBSTANSI INTI/KEGIATAN PRIORITAS	INSTANSI PELAKSANA	SASARAN PELAKSANAAN DI WILAYAH						
		SUMATERA	JAWA BALI	KALIMANTAN	SULAWESI	NUSA TENGGARA	MALUKU	PAPUA
								Obano, Okaba, Oksibil, Senggo, Muting, Numfor, Sarmi, Tanah Merah, Tjondronegoro – Serui.
<p>Perhubungan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan jaringan prasarana dan penyediaan sarana transportasi antar moda dan antar pulau yang terintegrasi sesuai dengan sistem transportasi nasional dan cetak biru transportasi multimoda. 	Kementerian PU	<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan jalan akses Bandara Kuala Namu dan jalan akses Pelabuhan Belawan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan jalan akses Tanjung Priok dan jalan akses Juanda Surabaya. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan jalan akses menuju pelabuhan dan bandara utama. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan jalan akses menuju bandara Gorontalo. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan jalan akses menuju Bandara Internasional Lombok Baru. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan jalan akses menuju pelabuhan dan bandara utama. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan jalan akses menuju pelabuhan dan bandara utama.
<p>Perhubungan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penurunan tingkat kecelakaan transportasi. 	Kementerian Perhubungan	<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan peralatan navigasi dan sistem telekomunikasi pelayaran (VTS, AIS) di wilayah (VTS, AIS) di wilayah 	<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan navigasi dan sistem telekomunikasi pelayaran (VTS, AIS) di wilayah Jawa dan Selat Sunda; pengerukan alur pelayaran di 	<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan navigasi dan sistem telekomunikasi pelayaran (VTS, AIS) di wilayah Kalimantan; pengerukan alur pelayaran di 	<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan navigasi dan sistem telekomunikasi pelayaran (VTS, AIS) di wilayah Sulawesi; 	<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan navigasi dan sistem telekomunikasi pelayaran (VTS, AIS) di wilayah Nusa Tenggara terutama Selat Lombok; pemeliharaan alur 	<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan navigasi dan sistem telekomunikasi pelayaran di wilayah Maluku dan pemeliharaan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan navigasi dan sistem telekomunikasi pelayaran (VTS, AIS) di wilayah Papua dan pemeliharaan alur

SUBSTANSI INTI/KEGIATAN PRIORITYAS	INSTANSI PELAKSANA	SASARAN PELAKSANAAN DI WILAYAH						
		SUMATERA	JAWA BALI	KALIMANTAN	SULAWESI	NUSA TENGGARA	MALUKU	PAPUA
		Sumatera terutama di Selat Malaka dan Selat Sunda; pengerukan alur pelayaran di pelabuhan Lhokseumawe, Belawan, Teluk Bayur, Dumai, Pekan Baru, Palembang, Panjang, Batam, Tg. Pinang.	pelabuhan Tg.Priok, Tg.Emas, Tg.Perak, Bojonegara, Benoa.	pelabuhan Pontianak, Banjarnasin, Samarinda, Balikpapan, Tarakan.	pengerukan alur pelayaran di Bitung, Makassar.	pelayaran pelabuhan Kupang.	alur pelayaran pelabuhan Ternate dan Ambon.	pelayaran pelabuhan Sorong, Biak, Jayapura.
Perhubungan • Penurunan tingkat kecelakaan transportasi.	Kementerian Perhubungan	•Pengadaan Fire Fighting Lokasi : di Lampung, Dabo dan Sibolga.	•Pengadaan Fire Fighting Lokasi: di Budiarto dan Cilacap.	•Pengadaan Fire Fighting Lokasi: di Sampit, Pangkalan Bun dan Budiarto.	•Pengadaan Fire Fighting Lokasi: Gorontalo, Luwuk, Sangir Talaud dan	•Pengadaan Fire Fighting Lokasi: Tambolaka, Waingapu, Alor, Bima, Ruteng dan Atambua.	•Pengadaan Fire Fighting Lokasi: di Saumlaki.	•Pengadaan Fire Fighting Lokasi: di Nabire, Waimena, Manokrawi, Jayapura, Sorong, Merauke dan

SUBSTANSI INTI/KEGIATAN PRIORITAS	INSTANSI PELAKSANA	SASARAN PELAKSANAAN DI WILAYAH						
		SUMATERA	JAWA BALI	KALIMANTAN	SULAWESI	NUSA TENGGARA	MALUKU	PAPUA
					Poso.			Maumere.
Perumahan Rakyat • Pembangunan rumah sehat bersubsidi; Pembangunan Rusunami dan twin blok berikut fasilitas pendukung kawasan permukiman untuk keluarga yang kurang mampu.	Kementerian PU Kementerian Perumahan Rakyat	•Pembangunan rusunawa : Kota Banda Aceh, Kota Tanjung Balai, Kota Tebing Tinggi, Kota Binjai, Kota Sibolga, Kota Medan, Kota Padang, Kota Bukit Tinggi, Kota Bengkulu, Kota Pekanbaru, Kota Palembang, Kota Pangkal Pinang, Kota Bandar Lampung.	•Pembangunan rusunawa : Kab. Serang, Kota Tangerang, DKI Jakarta, Kota Bandung, Kota Bogor, Kab. Sukabumi, Kab. Cirebon, Kota Depok, Kota Bekasi, Kota Tasikmalaya, Semarang, Kab. Cilacapkota, Surakarta, Kab. Karanganyar, Kab. Sukoharjo, Kota Pekalongan, Kab. Kudus, Kota Salatiga, Kab. Purwokerto (Banyumas), Kota	•Pembangunan rusunawa : Kota Palangkaraya, Kota Banjarmasin, Kota Samarinda, Kota Balikpapan, Kota Tarakan, Kota Bontang •Pembangunan infrastruktur kawasan-kawasan permukiman baru : Kota Palangkaraya, Kab. Kubu Raya, Kab. Sambas, Kota Pontianak, Kab. Bengkayang, Kab. Kobar, Banjarmasin, Barito Kuala, Tapin, Banjarbaru,	•Pembangunan rusunawa : Kota Makassar, Kab. Luwu Timur, Kota Bitung, Kota Manado, Kota Palu, Kota Bau-Bau, Kota Kendari, Kab. Kolaka. •Pembangunan infrastruktur kawasan-kawasan permukiman baru : Kota Makassar, Kota Takalar, Kab. Wajo, Kota Manado, Kota	•Pembangunan rusunawa : Kota Mataram, Kota Kupang. •Pembangunan infrastruktur kawasan-kawasan permukiman baru : Kab. Lombok Barat, Kab. Lombok Timur, Kab. Sumbawa, Kab. Sumba Timur, Kota Kupang, Kab. TTU.	•Pembangunan rusunawa : Kota Ambon. •Pembangunan infrastruktur kawasan-kawasan permukiman baru : Kota Tual, Kota Ambon, Kab. Maluku Tengah, Kota Ternate, Kab. Sofifi.	•Pembangunan rusunawa : Kota Jayapura. •Pembangunan infrastruktur kawasan-kawasan permukiman baru : Kota Jayapura, Kab. Jayapura, Kota Timika, Kab. Sorong Aimas, Kab. Sorong.

SUBSTANSI INTI/KEGIATAN PRIORITYAS	INSTANSI PELAKSANA	SASARAN PELAKSANAAN DI WILAYAH						
		SUMATERA	JAWA BALI	KALIMANTAN	SULAWESI	NUSA TENGGARA	MALUKU	PAPUA
		<ul style="list-style-type: none"> Pembangunan infrastruktur kawasan-kawasan permukiman baru : Kota Banda Aceh, Sabang, Aceh Barat Daya, Bireuen, Aceh Singkil, Kab. Pesisir Selatan, Kab. Solok Selatan, Kab. Dharmasraya, Kab. Tanah Datar, Kab. Pasaman, Kab. Pasaman Barat, Kota Padang, Kota Bukittinggi, Pekanbaru, 	<ul style="list-style-type: none"> Yogyakarta, Kab. Sleman, Kab. Bantul, Kab. Gresik, Kab. Lamongan, Kota Surabaya, Kota Malang, Kab. Jember, Kab. Jombang, Kab. Sidoarjo, Kab. Kediri. Pembangunan infrastruktur kawasan-kawasan permukiman baru : Kota Serang, Kab. Tangerang, Kota Pandeglang, Kota Depok, Kab. Bandung Barat, Kab. Bandung, Kab. Majalengka, Kab. Sumedang, 	<ul style="list-style-type: none"> Kota Balikpapan, Kab. Penajam Paser Utara, Kab. Kutai Kartanegara. 	<ul style="list-style-type: none"> Bitung, Kota Kotamobagu, Kab. Minut, Kota Gorontalo, Kab. Gorontalo, Kab. Boalemo, Kab. Pohuwato, Kota Palu, Kab. Banggai, Kab. Mamuju, Kab. Buton, Kota Kendari, Kab. Kolaka. 			

SUBSTANSI INTI/KEGIATAN PRIORITYAS	INSTANSI PELAKSANA	SASARAN PELAKSANAAN DI WILAYAH						
		SUMATERA	JAWA BALI	KALIMANTAN	SULAWESI	NUSA TENGGARA	MALUKU	PAPUA
		Kampar, Kuantan Singingi, Pelalawan, Dumai, Kota Tanjungpinang, Kota Batam, Kota Jambi, Kab. Sarolangun, Kota Bengkulu, Kab. Bengkulu Selatan, Kab. Rejang Lebong, Kab. Bengkulu Utara, Kab. Banyuasin, Kab. Musi Banyuasin, Kab. OKU, Kab. Ogan Ilir, Kota Lubuklinggau,	Kabupaten Blora, Kabupaten Kudus, Kabupaten Jepara, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Semarang, Kabupaten Pemalang, Kota Salatiga, Kab. Sleman, Bantul, Kulon Progo, Sumenep, Ngawi, Bangkalan, Pasuruan, Jember.					

SUBSTANSI INTI/KEGIATAN PRIORITY	INSTANSI PELAKSANA	SASARAN PELAKSANAAN DI WILAYAH						
		SUMATERA	JAWA BALI	KALIMANTAN	SULAWESI	NUSA TENGGARA	MALUKU	PAPUA
		Kota Pangkalpinang, Kota Bandar Lampung, Kota Metro, Kab. Lampung Selatan.						
Pengendalian Banjir • Penyelesaian pembangunan prasarana pengendalian banjir, diantaranya Banjir Kanal Timur Jakarta sebelum 2012.	Kementerian PU Pemda DKI		• Penyelesaian Banjir Kanal Timur, Peningkatan Kapasitas Banjir Kanal Barat dan Normalisasi Sungai Cisadane Hilir, Bekasi Hilir, Sunter, Cipinang, Cakung, Buaran, Jatikramat, Sabi, Dadap, Mookervart, dan Angke Hulu.					

SUBSTANSI INTI/KEGIATAN PRIORITYAS	INSTANSI PELAKSANA	SASARAN PELAKSANAAN DI WILAYAH						
		SUMATERA	JAWA BALI	KALIMANTAN	SULAWESI	NUSA TENGGARA	MALUKU	PAPUA
Pengendalian Banjir • Penanganan secara terpadu daerah aliran sungai Bengawan Solo sebelum 2013.	Kementerian PU		<ul style="list-style-type: none"> • Penanganan sedimen Waduk Wonogiri; Normalisasi Kali Mungkung, Gropol dan Sawur; Perbaikan dan Pengaturan Kali Kwadungan, Pembangunan Bojonegoro Barrage, Pembangunan Jabung Ring Dike, Normalisasi Kali Lamong, Pembangunan Bendung Gerak Sembayat, Konservasi Kali Tirtomoyo dan Kali Asin, Arboretum 					

SUBSTANSI INTI/KEGIATAN PRIORITAS	INSTANSI PELAKSANA	SASARAN PELAKSANAAN DI WILAYAH						
		SUMATERA	JAWA BALI	KALIMANTAN	SULAWESI	NUSA TENGGARA	MALUKU	PAPUA
			Sumber Daya Air Bengawan Solo.					
Pengendalian Banjir • Pengendalian Banjir Lahar Gunung Berapi dan Pengamanan Pantai.	Kementerian PU	•Pengendalian banjir Lokasi: di Kota Padang, dan Palembang.	•Pengendalian banjir Lokasi: di kota Bandung, Surabaya, Semarang. Pengendalian lahar/sedimen di Gunung Merapi.		•Pengendalian banjir Lokasi: di Gorontalo; Pengendalian lahar/sedimen di Gunung Bawakaraeng provinsi Sulsel.			
Mendukung Prioritas Ketahanan pangan nasional • Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya.	Kementerian PU	• Peningkatan/Rehabilitasi jaringan irigasi dan O & P Jaringan Irigasi.						
Mendukung Pencapaian Target MDGs	Kementerian PU	• Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku dengan target <i>meningkat dan terjaganya air baku dengan kapasitas.</i>						

SUBSTANSI INTI/KEGIATAN PRIORITAS	INSTANSI PELAKSANA	SASARAN PELAKSANAAN DI WILAYAH						
		SUMATERA	JAWA BALI	KALIMANTAN	SULAWESI	NUSA TENGGARA	MALUKU	PAPUA
• Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku.								
<p>Mendukung Pencapaian Target MDGs</p> <p>• Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Air Lainnya.</p>	Kementerian PU	<ul style="list-style-type: none"> •Pembangunan Bendungan Tiro dan Rajui Lokasi: di NAD. •Rehabilitasi waduk Way Jepara dan Batutegi di Lampung. 	<ul style="list-style-type: none"> •Pembangunan Bendungan Jatigede Lokasi: di Jabar; Karian dan Sindang Heula; Lokasi: di Banten, Diponegoro, Jatibarang, Pidekso, Gondang, Kendang Lokasi: di Jateng, Bajulmati di Jatim. •Rehabilitasi Waduk Malahayu, Darma dan Jatiluhur Lokasi: di Jabar; Waduk Krisak, Kedung Uling, Cengklik, Ketjo, Penjalin, Cacaban, Tempuran, 	<ul style="list-style-type: none"> •Pembangunan Bendungan Tritib di Kalsel dan Mrangkayu Lokasi: di Kaltim. •Rehabilitasi Waduk/Embung Merancang Lokasi: di Kaltim. 	<ul style="list-style-type: none"> •Pembangunan Bendungan Paseloreng Lokasi: di Sulsel. •Rehabilitasi Waduk/Embung Salamekko, Lokasi: di Sulsel. 	<ul style="list-style-type: none"> •Pembangunan Bendungan Mujur dan Pandanduri Lokasi: di NTB. Pembangunan Bendungan Raknamo Lokasi: di NTT. •Rehabilitasi Waduk/Embung Batujaje, Pengga, Tiu Kulit Lokasi: di NTB. 		

SUBSTANSI INTI/KEGIATAN PRIORITAS	INSTANSI PELAKSANA	SASARAN PELAKSANAAN DI WILAYAH						
		SUMATERA	JAWA BALI	KALIMANTAN	SULAWESI	NUSA TENGGARA	MALUKU	PAPUA
			Nglangon, Greneng, Simo, Sanggeh, Wadaslintang, Sempor, Plumbon, Gembong dan Wonogiri Lokasi: di Jateng; Waduk Gondang, Pacal, Karangates, Selorejo, Wonorejo, Wlingi, Sengguruh, Sampean Baru, Lokasi: di Jatim.					
Telekomunikasi • Penuntasan pembangunan jaringan serat optik di Indonesia Bagian Timur sebelum 2013.	Kementerian Komunikasi dan Informatika				•Penyediaan insentif bagi penyelenggara di 16 kota.	•Penyediaan insentif bagi penyelenggara di 6 kota.	•Penyediaan insentif bagi penyelenggara di 4 kota.	•Penyediaan insentif bagi penyelenggara di 8 kota.

SUBSTANSI INTI/KEGIATAN PRIORITAS	INSTANSI PELAKSANA	SASARAN PELAKSANAAN DI WILAYAH						
		SUMATERA	JAWA BALI	KALIMANTAN	SULAWESI	NUSA TENGGARA	MALUKU	PAPUA
Telekomunikasi • Penyediaan Jasa Telekomunikasi.	Kementerian Komunikasi dan Informatika	<ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan jasa akses telekomunikasi 13.312 desa. • Penyediaan jasa akses internet 1.251 kecamatan. • Penyediaan regional internet exchange di ibukota provinsi. • Penyediaan community access point 130 kecamatan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan jasa akses telekomunikasi 4.713 desa. • Penyediaan jasa akses internet 1.273 kecamatan. • Penyediaan regional internet exchange di ibukota provinsi. • Penyediaan community access point 92 kecamatan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan jasa akses telekomunikasi 3.797 desa. • Penyediaan jasa akses internet 459 kecamatan. • Penyediaan regional internet exchange di ibukota provinsi. 	<ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan jasa akses telekomunikasi 3.472 desa. • Penyediaan jasa akses internet 599 kecamatan. • Penyediaan regional internet exchange di ibukota provinsi. 	<ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan jasa akses telekomunikasi 2.229 desa. • Penyediaan jasa akses internet 268 kecamatan. • Penyediaan regional internet exchange di ibukota provinsi. 	<ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan jasa akses telekomunikasi 1.286 desa. • Penyediaan jasa akses internet 108 kecamatan. • Penyediaan regional internet exchange di ibukota provinsi. 	<ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan jasa akses telekomunikasi 3.015 desa. • Penyediaan jasa akses internet 260 kecamatan. • Penyediaan regional internet exchange di ibukota provinsi.

SUBSTANSI INTI/KEGIATAN PRIORITAS	INSTANSI PELAKSANA	SASARAN PELAKSANAAN DI WILAYAH						
		SUMATERA	JAWA BALI	KALIMANTAN	SULAWESI	NUSA TENGGARA	MALUKU	PAPUA
Telekomunikasi • Penyediaan Jasa Telekomunikasi.	Kementerian Komunikasi dan Informatika	• Penyediaan community access point 130 kecamatan.	• Penyediaan community access point 92 kecamatan.					
Transportasi Perkotaan • Perbaikan sistem dan jaringan transportasi sesuai dengan Cetak Biru Transportasi Perkotaan.	Kementerian Perhubungan	• Pengembangan Sistem angkutan perkotaan Lokasi: di Medan termasuk pembangunan ITS (Intelligent Traffic System).	• Pengembangan Sistem angkutan perkotaan Lokasi: di Surabaya, Bandung dan Jakarta termasuk pembangunan ITS untuk Jabodetabek.					
Transportasi Perkotaan • Penyelesaian pembangunan angkutan kereta listrik di Jakarta (MRT dan monorail) selambat-lambatnya 2014.	Kementerian Perhubungan		• Mass Rapid Transit Jakarta: • MRT Tahap I (Lebak Bulus - Dukuh Atas) : Pekerjaan detail					

SUBSTANSI INTI/KEGIATAN PRIORITAS	INSTANSI PELAKSANA	SASARAN PELAKSANAAN DI WILAYAH						
		SUMATERA	JAWA BALI	KALIMANTAN	SULAWESI	NUSA TENGGARA	MALUKU	PAPUA
			<p>engineering design dimulai Tahun 2010; Pekerjaan kon-struksi dimulai Tahun 2011</p> <ul style="list-style-type: none"> •MRT Tahap II (Dukuh Atas Kota): Studi Feasibility Study dimulai tahun 2009; Pekerjaan detail engineering design dimulai Tahun 2011; Pekerjaan kon-struksi dimulai Tahun 2013. •Monorail : •Pekerjaan penilaian inves-tasi yang telah dilakukan dan kebutuhan 					

SUBSTANSI INTI/KEGIATAN PRIORITAS	INSTANSI PELAKSANA	SASARAN PELAKSANAAN DI WILAYAH						
		SUMATERA	JAWA BALI	KALIMANTAN	SULAWESI	NUSA TENGGARA	MALUKU	PAPUA
			penyelesaian dimulai tahun 2010; Pekerja-an lanjutan pembangunan dimulai tahun 2013.					

**MATRIKS SINKRONISASI PUSAT DAN DAERAH DALAM PENCAPAIAN PRIORITAS NASIONAL
PRIORITAS 7 : IKLIM INVESTASI DAN IKLIM USAHA**

SUBSTANSI INTI/KEGIATAN PRIORITAS	INSTANSI PELAKSANA	SASARAN PELAKSANAAN DI WILAYAH
--------------------------------------	--------------------	--------------------------------

		SUMATERA	JAWA BALI	KALIMANTAN	SULAWESI	NUSA TENGGARA	MALUKU	PAPUA
Kepastian Hukum • Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan.	Kementerian Hukum dan HAM Kementerian PU BPN	<ul style="list-style-type: none"> Rancangan Peraturan Perundang-undangan tingkat pusat di bidang POLHUKAM, Keuangan Perbankan, Industri dan Perdagangan, KESRA, Pertanahan, Tata Ruang dan LH. 						
Kepastian Hukum • Penataan Produk Hukum dan Pelayanan Bantuan Hukum Departemen.	Kementerian Dalam Negeri	<ul style="list-style-type: none"> Penelaahan terhadap 20.000 Perda. 						
Kepastian Hukum • Peningkatan Deregulasi Kebijakan.	BKPM	<ul style="list-style-type: none"> Pelimpahan dan pendelegasian wewenang: <ul style="list-style-type: none"> (a) 16 Menteri dan Kapolri untuk perizinan dan nonperizinan usaha kepada Kepala BKPM; (b) 33 Gubernur melimpahkan wewenang perizinan dan nonperizinan urusan Provinsi kepada Kepala PDPPM (Perangkat Daerah Propinsi di bidang penanaman modal); (c) 497 Bupati/ Walikota melimpahkan perizinan dan nonperizinan urusan kabupaten/Kota kepada Kepala PDKPM (Perangkat Daerah Kab/Kota di bidang penanaman modal). Adanya harmonisasi dan sinkronisasi: <ul style="list-style-type: none"> (a) Pedoman dan tatacara perizinan dan nonperizinan dengan 17 sektor dan Polri; (b) Pedoman dan tatacara perizinan dan nonperizinan dengan 33 Pemerintah Provinsi; (c) Pedoman dan tatacara perizinan dan nonperizinan dengan 497 Pemerintah Kabupaten/Kota; (d) Peraturan sektoral di 17 sektor dan Polri di bidang penanaman modal. Penyusunan 4 buah Peraturan Kepala BKPM tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) bidang penanaman modal. <ul style="list-style-type: none"> Melakukan satu kajian per tahun atas isu yang terkait penanaman modal. Perbaikan "rating" indikator kemudahan berusaha. 						
Kepastian Hukum		<ul style="list-style-type: none"> Terlaksananya Penanganan dan Pencegahan Sengketa Konflik dan Perkara Pertanahan. 						

SUBSTANSI INTI/KEGIATAN PRIORITAS	INSTANSI PELAKSANA	SASARAN PELAKSANAAN DI WILAYAH						
		SUMATERA	JAWA BALI	KALIMANTAN	SULAWESI	NUSA TENGGARA	MALUKU	PAPUA
• Pengelolaan Pertanahan Provinsi.	BPN							
Kepastian Hukum • Pengelolaan Data dan Informasi Pertanahan.	BPN							<ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya Peta Pertanahan (di daerah). • Terlaksananya legalisasi Aset Tanah UKM. • Tersedianya Data dan Informasi Pertanahan yang terintegrasi secara nasional. • Terlaksananya penanganan dan pencegahan sengketa, konflik dan perkara pertanahan (di daerah).
Penyederhanaan Prosedur • Pengembangan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE).	BKPM							<ul style="list-style-type: none"> • Implementasi SPIPISE di 33 propinsi dan, 404 kabupaten dan 93 kota.
Penyederhanaan Prosedur • Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Penanaman Modal.	BKPM							<ul style="list-style-type: none"> • Sosialisasi PTSP di 33 Provinsi dan 497 Kabupaten/Kota. • Implementasi PTSP bidang penanaman modal di 33 provinsi, 404 kabupaten dan 93 kota. • Pembinaan, Penilaian dan Evaluasi PTSP bidang penanaman modal di 33 provinsi dan 497 kabupaten/kota.
Penyederhanaan Prosedur • Administrasi Badan Hukum.	Kementerian Hukum dan HAM							<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan dalam hal waktu pendaftaran badan hukum, biaya pendaftaran, pelayanan jasa hukum PT, pelayanan jasa hukum PT lembaga keuangan dan fasilitas penanaman modal, pelayanan jasa hukum badan hukum sosial yang sesuai standar dan

SUBSTANSI INTI/KEGIATAN PRIORITAS	INSTANSI PELAKSANA	SASARAN PELAKSANAAN DI WILAYAH						
		SUMATERA	JAWA BALI	KALIMANTAN	SULAWESI	NUSA TENGGARA	MALUKU	PAPUA
		akuntabel. • Pengumuman dalam Tambahan Berita Negara secara tepat waktu dan pelayanan permohonan badan hukum berbasis IT dengan data yang lengkap dan akurat, serta peningkatan penyelesaian gugatan masyarakat dan pemberian pendapat hukum secara akuntabel.						
Logistik Nasional • Peningkatan Kelancaran Distribusi Bahan Pokok.	Kementerian Perdagangan	• Pembangunan Pusat Pengendalian Harga dan Stok Komoditas (Early Warning System). • Sistem Pelaporan On Line Harga dan Stok Komoditas. • Pembangunan Pusat Informasi Distribusi Nasional. • Pengamanan Distribusi bahan Pokok dan Barang Strategis sejumlah 10 komoditi.						
Logistik Nasional • Revitalisasi Pasar Tradisional.	Kementerian Perdagangan	• Revitalisasi Pasar Tradisional.						
		• 23 Unit.	• 26 Unit.	• 13 Unit.	• 12 Unit.	• 8 Unit.	• 7 Unit.	• 8 Unit.
Logistik Nasional • Koordinasi Penataan dan Pengembangan Sistem Logistik Nasional.	Kemnko Perekonomian	• Rekomendasi kebijakan hasil koordinasi penataan dan pengembangan sistem logistik nasional yang diterapkan.						
Logistik Nasional • Perumusan Kebijakan dan Bimbingan Teknis Fasilitas Bidang Kepabeanaan (Prioritas Nasional).	Kementerian Keuangan	• Permenkeu, Perdirjen.						

SUBSTANSI INTI/KEGIATAN PRIORITAS	INSTANSI PELAKSANA	SASARAN PELAKSANAAN DI WILAYAH						
		SUMATERA	JAWA BALI	KALIMANTAN	SULAWESI	NUSA TENGGARA	MALUKU	PAPUA
Logistik Nasional • Pengembangan dan penetapan sistem logistik nasional yang menjamin kelancaran arus barang dan mengurangi biaya transaksi/ekonomi biaya tinggi.	Kementerian Perdagangan	<ul style="list-style-type: none"> Penerapan dan penataan sistem logistik nasional. 						
Logistik Nasional • Pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan di bidang lalu lintas dan angkutan laut (Pembangunan kapal perintis dan subsidi operasi perintis).	Kementerian Perdagangan	<ul style="list-style-type: none"> Beberapa trayek perintis antara lain: Aceh, Riau, Sumbar, Bengkulu. 	<ul style="list-style-type: none"> Pembangunan kapal di DKI dan Subsidi perintis di Jawa Timur. 	<ul style="list-style-type: none"> Beberapa trayek perintis antara lain: Kalbar, Kalteng, Kalsel. 	<ul style="list-style-type: none"> Beberapa trayek perintis antara lain: Sulut, Sultra, Sulteng, Sulbar, Gorontalo. 	<ul style="list-style-type: none"> Beberapa trayek perintis antara lain: NTB, NTT. 	<ul style="list-style-type: none"> Beberapa trayek perintis antara lain: Maluku Utara, Maluku. 	<ul style="list-style-type: none"> Beberapa trayek perintis antara lain: Papua Barat, Papua.
Logistik Nasional • Pengelolaan dan pembangunan kegiatan di bidang pelabuhan dan pengerukan.	Kementerian Perdagangan	<ul style="list-style-type: none"> Pembangunan dan peningkatan kapasitas pelabuhan utama, pengumpul, dan pengumpan. 						
		<ul style="list-style-type: none"> Wilayah Sumatera antara lain: Lhokseumawe, Belawan, Teluk Bayur, Dumai, 	<ul style="list-style-type: none"> Wilayah Jawa-Bali antara lain: Tg Priok, Tg Emas, Tg Perak, Cigading dan Benoa. 	<ul style="list-style-type: none"> Wilayah Kalimantan antara lain: Pontianak, Banjarmasin, Samarinda, Balikpapan. 	<ul style="list-style-type: none"> Wilayah Sulawesi antara lain: Bitung, dan Makasar. 	<ul style="list-style-type: none"> Wilayah Nusa Tenggara, antara lain Kupang. 	<ul style="list-style-type: none"> Wilayah Maluku, antara lain Ambon. 	<ul style="list-style-type: none"> Wilayah Papua antara lain: Sorong, Biak, Jayapura.

SUBSTANSI INTI/KEGIATAN PRIORITAS	INSTANSI PELAKSANA	SASARAN PELAKSANAAN DI WILAYAH						
		SUMATERA	JAWA BALI	KALIMANTAN	SULAWESI	NUSA TENGGARA	MALUKU	PAPUA
		Pekan Baru, Palembang, Panjang, batam, Tanjung Pinang.						
Logistik Nasional • Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Jalan Nasional.	Kementerian PU	<ul style="list-style-type: none"> • Preservasi jalan nasional lintas Sumatera, Peningkatan kapasitas jalan nasional lintas dan jalan strategis nasional. • Lokasi: Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, Riau, Kepulauan Riau, Bangka 	<ul style="list-style-type: none"> • Preservasi jalan nasional lintas Jawa-Bali, Peningkatan kapasitas jalan nasional lintas terutama lintas pantai Utara Jawa dan jalan strategis nasional terutama lintas Selatan Jawa, serta pembangunan fly overan strategis nasional. • Lokasi: Banten, Jawa Barat, Jawa 	<ul style="list-style-type: none"> • Preservasi jalan nasional lintas Kalimantan, Peningkatan kapasitas jalan nasional lintas terutama lintas Selatan Kalimantan, serta jalan strategis nasional terutama jalan menuju kawasan perbatasan. • Lokasi: Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan 	<ul style="list-style-type: none"> • Preservasi jalan nasional lintas Sulawesi, Peningkatan kapasitas jalan nasional lintas terutama lintas Barat Sulawesi, serta jalan strategis nasional terutama jalan menuju kawasan perbatasan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Preservasi jalan nasional lintas Nusa Tenggara, Peningkatan kapasitas jalan nasional lintas terutama lintas Pulau di Nusa Tenggara, serta jalan strategis nasional. • Lokasi: NTB, NTT 	<ul style="list-style-type: none"> • Preservasi jalan nasional lintas Maluku, Peningkatan kapasitas jalan nasional lintas terutama lintas Pulau di Kepulauan Maluku, serta jalan strategis nasional. 	<ul style="list-style-type: none"> • Preservasi jalan nasional lintas Papua, Peningkatan kapasitas jalan nasional lintas terutama 11 lintas di Papua dan Papua Barat, serta jalan strategis nasional. • Lokasi: Papua, Papua Barat

SUBSTANSI INTI/KEGIATAN PRIORITAS	INSTANSI PELAKSANA	SASARAN PELAKSANAAN DI WILAYAH						
		SUMATERA	JAWA BALI	KALIMANTAN	SULAWESI	NUSA TENGGARA	MALUKU	PAPUA
		Belitung, Lampung	Tengah, DI Yogyakarta, dan Jawa Timur	Selatan, Kalimantan Timur	<ul style="list-style-type: none"> Lokasi: Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Gorontalo 		<ul style="list-style-type: none"> Lokasi: Maluku 	
Logistik Nasional <ul style="list-style-type: none"> Pembinaan Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan kapasitas jalan dan fasilitas jalan bebas hambatan dan perkotaan. 	Kementerian PU	<ul style="list-style-type: none"> Pembangunan jalan tol Medan-Kuala Namu, Jalan Akses Bandara Kuala Namu. 	<ul style="list-style-type: none"> Pembangunan jalan tol di Kota Bandung, Jalan tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan, Solo-Mantingan-Kertosono, dan Serangan-Tanjung Benoa 		<ul style="list-style-type: none"> Pembangunan jalan akses bandara Gorontalo. 			

SUBSTANSI INTI/KEGIATAN PRIORITAS	INSTANSI PELAKSANA	SASARAN PELAKSANAAN DI WILAYAH						
		SUMATERA	JAWA BALI	KALIMANTAN	SULAWESI	NUSA TENGGARA	MALUKU	PAPUA
Logistik Nasional • Pembangunan dan pengelolaan prasaranan dan fasilitas pendukung kereta api.	Kementerian Perhubungan	• Terbangunnya jalur KA Simpang-Tanjung Api, Jalur KA Kota-Padang-Pulau bali.	• Jalur KA Pasoso-Pelabuhan Tanjung Priok, dan pembangunan jalur ganda manggarai Cikarang.					
Sistem Informasi • Pengelolaan Fasilitas Ekspor dan Impor.	Kementerian Perdagangan	• Pelabuhan/ bandara internasional.						
Sistem Informasi • Perumusan Kebijakan dan Pengembangan Teknologi Informasi Kepabeanaan dan Cukai.	Kementerian Keuangan	• Sistem Aplikasi IT.						
Sistem Informasi • Pengelolaan dan Pembangunan Kegiatan di bidang pelabuhan dan	Kementerian Perhubungan	• 3 lokasi (Pelabuhan Pekanbaru, Palembang, dan	• 2 lokasi (Pelabuhan DKI Jakarta dan Benoa).	• 3 Lokasi (Pelabuhan Pontianak, Samarinda, dan	• 2 Lokasi (Pelabuhan Bitung dan Makasar).		• 2 lokasi (Pelabuhan Ternate dan Ambon).	• 2 lokasi (Pelabuhan Jayapura dan Sorong).

SUBSTANSI INTI/KEGIATAN PRIORITAS	INSTANSI PELAKSANA	SASARAN PELAKSANAAN DI WILAYAH						
		SUMATERA	JAWA BALI	KALIMANTAN	SULAWESI	NUSA TENGGARA	MALUKU	PAPUA
pengerukan.		Panjang).		Banjarmasin).				
Sistem Informasi • Pengembangan sertifikasi sistem elektronik jasa aplikasi dan konten untuk mendukung transaksi elektronik.	Kementerian Komunikasi dan Informatika	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya pengembangan sertifikasi sistem elektronik jasa aplikasi dan konten untuk mendukung transaksi elektronik secara nasional. 						
Sistem Informasi • Koordinasi pengembangan dan penerapan sistem National Single Window/NSW dan ASEAN Single Window/ASW.	Kemendagri	<ul style="list-style-type: none"> • Rekomendasi di bidang pengembangan dan penerapan NSW dan ASW yang diimplementasikan. 						
Kawasan Ekonomi Khusus • Dukungan Sektor Perdagangan Terhadap Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).	Kementerian Perdagangan	<ul style="list-style-type: none"> • Menunggu penetapan Dewan Nasional/ Timnas KEK. 						

SUBSTANSI INTI/KEGIATAN PRIORITAS	INSTANSI PELAKSANA	SASARAN PELAKSANAAN DI WILAYAH						
		SUMATERA	JAWA BALI	KALIMANTAN	SULAWESI	NUSA TENGGARA	MALUKU	PAPUA
Kawasan Ekonomi Khusus • Pengembangan Penanaman Modal Kawasan Ekonomi Khusus.	BKPM	<ul style="list-style-type: none"> • Terbangunnya KEK di 5 (lima) lokasi. 						
Kawasan Ekonomi Khusus • Perumusan Kebijakan di Bidang PPN, PBB, BPHTB, KUP, PPSP, dan Bea Materai.	Kementerian Keuangan	<ul style="list-style-type: none"> • Permenkeu, Perdirjen. 						
Kawasan Ekonomi Khusus • Perumusan Kebijakan di Bidang PPh dan Perjanjian Kerjasama Perpajakan Internasional.	Kementerian Keuangan	<ul style="list-style-type: none"> • Permenkeu, Perdirjen. 						
Kawasan Ekonomi Khusus • Perumusan Kebijakan dan Bimbingan Teknis Fasilitas Bidang Kepabeanan (Prioritas Nasional).	Kementerian Keuangan	<ul style="list-style-type: none"> • Permenkeu, Perdirjen. 						
Kawasan Ekonomi Khusus	Kemenko Perekonomian	<ul style="list-style-type: none"> • Rekomendasi kebijakan urusan penataan ruang dan pengembangan wilayah yang terimplementasi, dan peraturan pelaksana UU KEK yang 						

SUBSTANSI INTI/KEGIATAN PRIORITAS	INSTANSI PELAKSANA	SASARAN PELAKSANAAN DI WILAYAH						
		SUMATERA	JAWA BALI	KALIMANTAN	SULAWESI	NUSA TENGGARA	MALUKU	PAPUA
<ul style="list-style-type: none"> • Koordinasi pengembangan urusan penataan ruang dan pengembangan wilayah. 		terselesaikan.						
<p>Kebijakan Ketenagakerjaan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menyempurnakan peraturan ketenagakerjaan dan sinkronisasi kebijakan ketenagakerjaan (pusat) dengan kebijakan/ peraturan daerah. 	Kementerian NakerTrans	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Ketenagakerjaan akan diterapkan secara nasional. • Penyelarasan Perda Ketenagakerjaan dengan peraturan perundangan. 						
<p>Kebijakan Ketenagakerjaan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penguatan lembaga hubungan industrial: (a) mendorong pembentukan lembaga bipartite; (b) Penguatan perundingan antara perwakilan pekerja dan pengusaha dengan meningkatkan teknik-teknik bernegosiasi; (c) Peningkatan kualitas penyelesaian perselisihan. 	Kementerian NakerTrans	<ul style="list-style-type: none"> • Lembaga bipartit meningkat 5% (target nasional) (Sumut, Sumsel, Kepri, Riau). • Penerapan mekanisme perundingan di daerah rawan perselisihan hubungan 	<ul style="list-style-type: none"> • Lembaga bipartit meningkat 5% (target nasional); Target diatas Nasional (DKI Jakarta, Jabar, Banten, Jateng, Jatim). • Penerapan mekanisme perundingan di seluruh provinsi 	<ul style="list-style-type: none"> • Lembaga bipartit meningkat 5% (target nasional) (Kaltim, Kalbar, Kalsel). • Penerapan mekanisme perundingan di daerah rawan perselisihan hubungan 	<ul style="list-style-type: none"> • Lembaga bipartit meningkat 5% (target nasional) (sulteng, Gorontalo). • Penerapan mekanisme perundingan di daerah rawan 	<ul style="list-style-type: none"> • Lembaga bipartit meningkat 5% (target nasional) (NTB, NTT). • Penerapan mekanisme perundingan di daerah rawan perselisihan hubungan industrial. • Tahun 2014 , 85% 	<ul style="list-style-type: none"> • Lembaga bipartit meningkat 5% (target nasional) (Maluku). • Penerapan mekanisme perundingan di daerah rawan perselisihan 	<ul style="list-style-type: none"> • Lembaga bipartit meningkat 5% (target nasional) (Papua). • Penerapan mekanisme perundingan di daerah rawan perselisihan hubungan industrial. • Tahun 2014 ,

SUBSTANSI INTI/KEGIATAN PRIORITAS	INSTANSI PELAKSANA	SASARAN PELAKSANAAN DI WILAYAH						
		SUMATERA	JAWA BALI	KALIMANTAN	SULAWESI	NUSA TENGGARA	MALUKU	PAPUA
		industrial di Sumatera Utara dan Riau. <ul style="list-style-type: none"> Tahun 2014 , 85% perselisihan HI diselesaikan diluar pengadilan. 	terutama yang rawan perselisihan hubungan industrial (Jabar, Banten, DKI, Jatim). <ul style="list-style-type: none"> Tahun 2014 85% perselisihan HI diselesaikan diluar pengadilan. 	industrial. <ul style="list-style-type: none"> Tahun 2014 , 85% perselisihan HI diselesaikan diluar pengadilan. 	perselisihan hubungan industrial. <ul style="list-style-type: none"> Tahun 2014 , 85% perselisihan HI diselesaikan diluar pengadilan. 	perselisihan HI diselesaikan diluar pengadilan.	n hubungan industrial. <ul style="list-style-type: none"> Tahun 2014 , 85% perselisihan HI diselesaikan diluar pengadilan. 	85% perselisihan HI diselesaikan diluar pengadilan.
Kebijakan Ketenagakerjaan <ul style="list-style-type: none"> Penerapan Keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di perusahaan sesuai standard dan manajemen K3. 	Kementerian NakerTrans	<ul style="list-style-type: none"> Menurunnya angka kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. 						

**MATRIKS SINKRONISASI PUSAT DAN DAERAH DALAM PENCAPAIAN PRIORITAS NASIONAL
PRIORITAS 8 : ENERGI**

SUBSTANSI INTI/KEGIATAN PRIORITAS	INSTANSI PELAKSANA	SASARAN PELAKSANAAN DI WILAYAH						
		SUMATERA	JAWA BALI	KALIMANTAN	SULAWESI	NUSA TENGGARA	MALUKU	PAPUA

SUBSTANSI INTI/KEGIATAN PRIORITAS	INSTANSI PELAKSANA	SASARAN PELAKSANAAN DI WILAYAH						
		SUMATERA	JAWA BALI	KALIMANTAN	SULAWESI	NUSA TENGGARA	MALUKU	PAPUA
Kebijakan <ul style="list-style-type: none"> • Penetapan kebijakan energi yang memastikan penanganan energi nasional yang terintegrasi sesuai dengan Rencana Induk Energi Nasional. 	Kemendagri	<ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan untuk koordinasi pengembangan Desa Mandiri Energi. 						
Kapasitas Energi <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kapasitas pembangkit listrik melalui Pembangkit PLTD (Unit/kW). 	Kementerian ESDM	<ul style="list-style-type: none"> • PLTD (Unit/kW) di NAD 9 Unit, Riau 4 Unit, Babel 13 Unit. 	<ul style="list-style-type: none"> • 4 unit, 1 MW lokasi di Bali. 	<ul style="list-style-type: none"> • Kalbar 7 Unit, Kalteng 5 Unit, Kaltim 6 unit, Kalsel 4 Unit. 	<ul style="list-style-type: none"> • PLTD (Unit/kW) di Sulut 14 Unit, Gorontalo 6 Unit, Sulteng 7 Unit, Sulsel 8 Unit, Sultra 10 Unit. 	<ul style="list-style-type: none"> • PLTD (Unit/kW) di NTB 8 Unit, NTT 17 Unit. 	<ul style="list-style-type: none"> • Maluku 13 Unit, Malut 18 Unit. 	<ul style="list-style-type: none"> • PLTD (Unit/kW) di Papua 22 unit.

SUBSTANSI INTI/KEGIATAN PRIORITAS	INSTANSI PELAKSANA	SASARAN PELAKSANAAN DI WILAYAH						
		SUMATERA	JAWA BALI	KALIMANTAN	SULAWESI	NUSA TENGGARA	MALUKU	PAPUA
Kapasitas Energi • Peningkatan kapasitas pembangkit listrik melalui Jaringan Transmisi Tenaga Listrik (kms).	Kementerian ESDM	• Transmisi Tenaga Listrik 10381 kms.	• Transmisi Tenaga Listrik 7.737 kms.	• Transmisi Tenaga Listrik 4144 kms.	• Transmisi Tenaga Listrik 3177 kms.	• Transmisi Tenaga Listrik 1216 kms.	• Transmisi Tenaga Listrik 359 kms.	• Transmisi Tenaga Listrik 265 kms.
Kapasitas Energi • Peningkatan kapasitas pembangkit listrik melalui Gardu Induk Transmisi Tenaga Listrik (kms).	Kementerian ESDM	• Gardu induk 11700 MVA.	• Gardu induk 40.920 MVA.	• Gardu induk 1510 MVA.	• Gardu induk 2250 MVA.	• Gardu induk 670 MVA.	• Gardu induk 130 MVA.	• Gardu induk 130 MVA.
Kapasitas Energi • Peningkatan kapasitas pembangkit listrik melalui Gardu Distribusi kVA.	Kementerian ESDM	• Gardu Distribusi 14105 Unit/ 725500 kVA.	• Gardu Distribusi 6280Unit/ 324750 kVA.	• Gardu Distribusi 6910Unit/ 340250 kVA.	• Gardu Distribusi 9035 Unit/ 439750 kVA.	• Gardu Distribusi 4890 Unit/ 253750 kVA.	• Gardu Distribusi 3725Unit/ 191000 kVA.	• Gardu Distribusi 2400 Unit/ 126250 kVA.
Kapasitas Energi • Peningkatan kapasitas pembangkit listrik melalui JTM.	Kementerian ESDM	• JTM 46330 kms.	• JTM 19.320 kms.	• JTM 19350 kms.	• JTM 25580 kms.	• JTM 13355 kms.	• JTM 9650 kms.	• JTM 6450 kms.
Kapasitas Energi • Peningkatan kapasitas pembangkit listrik melalui JTR.	Kementerian ESDM	• JTR 45990 kms.	• JTR 18.310 kms.	• JTR 19350 kms.	• JTR 24760 kms.	• JTR 14410 kms.	• JTR 8360 kms.	• JTR 5850 kms.

SUBSTANSI INTI/KEGIATAN PRIORITAS	INSTANSI PELAKSANA	SASARAN PELAKSANAAN DI WILAYAH						
		SUMATERA	JAWA BALI	KALIMANTAN	SULAWESI	NUSA TENGGARA	MALUKU	PAPUA
Kapasitas Energi • Jumlah pelaksanaan Survei Umum di Wilayah Terbuka.	Kementerian ESDM	• Lepas Pantai Indonesia Barat Selatan.	• Lepas Pantai Indonesia Barat Selatan.	• Lepas Pantai Indonesia Barat Selatan, Lepas Pantai Indonesia Barat.	• Lepas Pantai Sulawesi Selatan, Lepas Pantai Indonesia Timur, Lepas Pantai Indonesia Barat.	• Lepas Pantai Timur Indonesia, Lepas Pantai Indonesia Timur, Lepas Pantai Indonesia Barat.	• Lepas Pantai Timur Indonesia, Lepas Pantai Indonesia Timur.	• Lepas Pantai Timur Indonesia, Lepas Pantai Indonesia Timur.
Energi Alternatif • Pengembangan Coal Bed Methane.	Kementerian ESDM	• Pengembangan Coal Bed Methane di Sumatera Selatan.		• Pengembangan Coal Bed Methane di Kalimantan Timur.				
Energi Alternatif • Peningkatan kapasitas PLTP terpasang.	Kementerian ESDM	• Jumlah kapasitas PLTP terpasang sebesar 1825 MW di tahun 2014.	• Jumlah kapasitas PLTP terpasang sebesar 1525 MW di tahun 2014.		• Jumlah kapasitas PLTP terpasang sebesar 125 MW di tahun	• Jumlah kapasitas PLTP terpasang sebesar 71 MW di tahun 2014.	• Jumlah kapasitas PLTP terpasang sebesar 37	

SUBSTANSI INTI/KEGIATAN PRIORITAS	INSTANSI PELAKSANA	SASARAN PELAKSANAAN DI WILAYAH						
		SUMATERA	JAWA BALI	KALIMANTAN	SULAWESI	NUSA TENGGARA	MALUKU	PAPUA
					2014.		MW di tahun 2014.	
Energi Alternatif <ul style="list-style-type: none"> • Listrik Desa (EBT). • PLTS 50 Wp Tersebar. • PLTS Terpusat 15 kW. • PLTMH (kW). • PLT Angin (kW). 	Kementerian ESDM	<ul style="list-style-type: none"> • 397.550. • 65. • 9.910. • 1.600. 	<ul style="list-style-type: none"> • 160.125. • 43. • 2.467. • 1.280. 	<ul style="list-style-type: none"> • 188.400. • 28. • 5.220. • 320. 	<ul style="list-style-type: none"> • 266.630. • 51. • 7.831. • 3.940. 	<ul style="list-style-type: none"> • 156.568. • 27. • 4100. • 5000. 	<ul style="list-style-type: none"> • 153.528. • 33. • 5.030. • 5.910. 	<ul style="list-style-type: none"> • 66.708. • 17. • 3.930. • 4.200.
Energi Alternatif <ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan unit pengolahan Biofuel. 	Kementerian ESDM	<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan unit pengolahan Biofuel di 5-6 desa terpilih. 						
Energi Alternatif <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman tahunan (Penyediaan Bahan bakar Bio Energi). 	Kementerian Pertanian	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya produksi, produktivitas dan mutu tanaman tahunan (Penyediaan Bahan bakar Bio Energi) yaitu Klp Sawit: 89 Jt T; 	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya produksi, produktivitas dan mutu tanaman tahunan (Penyediaan Bahan bakar Bio Energi) yaitu Klp Sawit: 0,045 Jt 	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya produksi, produktivitas dan mutu tanaman tahunan (Penyediaan Bahan bakar Bio Energi) yaitu Klp Sawit: 0,03 Jt T; 	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya produksi, produktivitas dan mutu tanaman tahunan (Penyediaan Bahan bakar Bio Energi) 	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya produksi, produktivitas dan mutu tanaman tahunan (Penyediaan Bahan bakar Bio Energi) yaitu Jarak Pagar: 27 Ribu T. 	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya produksi, produktivitas dan mutu tanaman tahunan (Penyediaan Bahan bakar 	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya produksi, produktivitas dan mutu tanaman tahunan (Penyediaan Bahan bakar Bio Energi) yaitu Klp Sawit: 0,003 Jt T; Jarak

SUBSTANSI INTI/KEGIATAN PRIORITAS	INSTANSI PELAKSANA	SASARAN PELAKSANAAN DI WILAYAH						
		SUMATERA	JAWA BALI	KALIMANTAN	SULAWESI	NUSA TENGGARA	MALUKU	PAPUA
		Jarak Pagar: 23 Ribu T.	T; Jarak Pagar: 17 Ribu T.	Jarak Pagar: 4 Ribu T.	yaitu Klp Sawit: 0,006 Jt T; Jarak Pagar: 40 Ribu T.		Bio Energi) yaitu Jarak Pagar: 5 Ribu T.	Pagar: 5 Ribu T.
Energi Alternatif • Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman tahunan (Penyediaan Bahan bakar Bio Energi).	BPN	• Terlaksananya identifikasi dan penertiban tanah terindikasi terlantar.						
Konversi menuju penggunaan gas ▪ Pembangunan LPG miniplant.	Kementerian ESDM	• Pembangunan LPG miniplant Musi Banyuasin (Sumsel) (1 miniplant).						
Konversi menuju penggunaan gas ▪ Pembangunan Jaringan Gas.	Kementerian ESDM	• Pembangunan Jaringan Gas Kota Lhokseumawe, Pekanbaru, Prabumulih, Muara Enim, Jambi dan Lampung (@	• Pembangunan Jaringan Gas Kota Jakarta, Bekasi, Depok, Subang, Semarang, Blora, Sidoarjo dan	• Balikpapan, samarinda dan Tarakan (@ 4000 SR).	• Sengkang (@ 4000 SR).			• Sorong (@ 4000 SR).

SUBSTANSI INTI/KEGIATAN PRIORITAS	INSTANSI PELAKSANA	SASARAN PELAKSANAAN DI WILAYAH						
		SUMATERA	JAWA BALI	KALIMANTAN	SULAWESI	NUSA TENGGARA	MALUKU	PAPUA
		4000 SR).	Bangkalan (@ 4000 SR).					
Konversi menuju penggunaan gas <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembangunan SPBG (gas untuk transportasi). 	Kementerian ESDM	<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan SPBG (gas untuk transportasi) diPalembang (7 SPBG). 	<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan SPBG (gas untuk transportasi) diSurabaya (7 SPBG). 	<ul style="list-style-type: none"> • Balikpapan (7 SPBG). 				

MATRIKS SINKRONISASI PUSAT DAN DAERAH DALAM PENCAPAIAN PRIORITAS NASIONAL

PRIORITAS 9 : LINGKUNGAN HIDUP DAN PENGELOLAAN BENCANA

SUBSTANSI INTI/KEGIATAN PRIORITAS	INSTANSI PELAKSANA	SASARAN PELAKSANAAN DI WILAYAH						
		SUMATERA	JAWA BALI	KALIMANTAN	SULAWESI	NUSA TENGGARA	MALUKU	PAPUA
Perubahan Iklim • Peningkatan keberdayaan pengelolaan lahan gambut.	Kemeneg Lingkungan Hidup	• Terlaksananya pemantauan dan pengawasan pengelolaan lingkungan kawasan gambut.		• Pemantauan dan pengawasan pengelolaan lingkungan kawasan gambut.				• Pemantauan dan pengawasan pengelolaan lingkungan kawasan gambut (Papua).
Perubahan Iklim • Peningkatan hasil rehabilitasi seluas 500,000 ha per tahun.	Kemeneg Lingkungan Hidup	• Terlaksananya kebijakan konservasi dan pengendalian kerusakan hutan dan lahan dan kebijakan dan evaluasi pemanfaatan ruang berdasarkan daya dukung lingkungan dan pemantauan berdasarkan		• Terlaksananya kebijakan konservasi dan pengendalian kerusakan hutan dan lahan dan kebijakan dan evaluasi pemanfaatan ruang berdasarkan daya dukung lingkungan dan pemantauan berdasarkan pendekatan ekosistem.		• Meningkatnya hasil rehabilitasi seluas 500,000 ha per tahun.		• Berupa kebijakan konservasi dan pengendalian kerusakan hutan dan lahan dan kebijakan dan evaluasi pemanfaatan ruang berdasarkan daya dukung lingkungan.

SUBSTANSI INTI/KEGIATAN PRIORITAS	INSTANSI PELAKSANA	SASARAN PELAKSANAAN DI WILAYAH						
		SUMATERA	JAWA BALI	KALIMANTAN	SULAWESI	NUSA TENGGARA	MALUKU	PAPUA
		pendekatan ekosistem.						
Perubahan Iklim <ul style="list-style-type: none"> • Penekanan laju deforestasi secara sungguh-sungguh diantaranya melalui kerjasama lintas kementerian terkait serta optimalisasi dan efisiensi sumber pendanaan seperti dana Iuran Hak Pemanfaatan Hutan (IHPH), Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH), dan Dana Reboisasi. 	Kemeneg Lingkungan Hidup	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya kebijakan konservasi dan pengendalian kerusakan hutan dan lahan dan kebijakan dan evaluasi pemanfaatan ruang berdasarkan daya dukung lingkungan dan pemantauan berdasarkan pendekatan ekosistem. 		<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya kebijakan konservasi dan pengendalian kerusakan hutan dan lahan dan kebijakan dan evaluasi pemanfaatan ruang berdasarkan daya dukung lingkungan dan pemantauan berdasarkan pendekatan ekosistem. 				
Perubahan Iklim : <i>Konservasi dan rehabilitasi kawasan pesisir dan laut</i> <ul style="list-style-type: none"> • Pengelolaan dan pengembangan 	Dep. Kelautan dan Perikanan	<ul style="list-style-type: none"> • Terkelolanya kawasan ekosistem terumbu karang, lamun, mangrove dan biota perairan yang terancam punah. 						

SUBSTANSI INTI/KEGIATAN PRIORITAS	INSTANSI PELAKSANA	SASARAN PELAKSANAAN DI WILAYAH						
		SUMATERA	JAWA BALI	KALIMANTAN	SULAWESI	NUSA TENGGARA	MALUKU	PAPUA
konservasi kawasan dan jenis.		<ul style="list-style-type: none"> Lokasi : Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepri, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung. 	<ul style="list-style-type: none"> Lokasi : Jawa Tengah, Jawa Barat, Bali, Banten, DKI Jakarta, Jawa Timur. 	<ul style="list-style-type: none"> Lokasi : Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan. 	<ul style="list-style-type: none"> Lokasi : Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara. 	<ul style="list-style-type: none"> Lokasi : NTB, NTT. 	<ul style="list-style-type: none"> Lokasi : Maluku, Maluku Utara. 	<ul style="list-style-type: none"> Lokasi : Papua, Papua Barat.
Pengendalian Kerusakan Lingkungan <ul style="list-style-type: none"> Penurunan beban pencemaran lingkungan melalui pengawasan ketaatan pengendalian pencemaran air limbah dan emisi di 680 kegiatan industri dan jasa pada 2010 dan terus berlanjut. 	Kemeneg Lingkungan Hidup	<ul style="list-style-type: none"> Terlaksananya pengendalian Pencemaran Air dan Udara : dengan pemantauan industri pertambangan, energi dan migas, agroindustri, dan manufaktur (202 Industri); Pengelolaan B3 dan Limbah B3 kegiatan pertambangan, energi, minyak dan gas, serta industri manufaktur, agroindustri dan jasa; Peningkatan pnaatan administrasi pengelolaan B3 dan Limbah B3, serta Penanganan kasus lingkungan. 						
Pengendalian Kerusakan Lingkungan <ul style="list-style-type: none"> Penurunan jumlah hotspot kebakaran hutan sebesar 20% per 	Kemeneg Lingkungan Hidup	<ul style="list-style-type: none"> Tersedianya data dan informasi sebaran hotspot di 4 provinsi 		<ul style="list-style-type: none"> Penyediaan data dan informasi sebaran hotspot di 4 provinsi rawan kebakaran 				

SUBSTANSI INTI/KEGIATAN PRIORITAS	INSTANSI PELAKSANA	SASARAN PELAKSANAAN DI WILAYAH						
		SUMATERA	JAWA BALI	KALIMANTAN	SULAWESI	NUSA TENGGARA	MALUKU	PAPUA
tahun.		rawan kebakaran hutan dan lahan sebagai indikator keberhasilan mekanisme pencegahan kebakaran hutan, dan penanganan kasus lingkungan.		hutan dan lahan sebagai indikator keberhasilan mekanisme pencegahan kebakaran hutan, dan penanganan kasus lingkungan (Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur).				
Pengendalian Kerusakan Lingkungan • Pengendalian Pencemaran Udara : dengan : (a)Pemantauan industri pertambangan, energi dan migas, agroindustri, dan manufaktur ; (b)Pemantauan kualitas udara di Kab/ Kota, (c)Pemantauan SPBU untuk mengetahui kualitas bahan bakar, (d)Pemantauan kinerja lalu lintas (kecepatan dan kerapatan lalu lintas),(e)Pemantauan penataan terhadap ambang batas	Kemeneg Lingkungan Hidup	• Terpantaunya penataan terhadap ambang batas emisi kendaraan, dan penerbitan peraturan perundangan (Medan, Palembang).	• Terpantaunya penataan terhadap ambang batas emisi kendaraan, dan penerbitan peraturan perundangan.	• Terpantaunya penataan terhadap ambang batas emisi kendaraan, dan penerbitan peraturan perundangan (Palangkaraya).	• Terpantaunya penataan terhadap ambang batas emisi kendaraan, dan penerbitan peraturan perundangan (Manado, Makasar).			

SUBSTANSI INTI/KEGIATAN PRIORITAS	INSTANSI PELAKSANA	SASARAN PELAKSANAAN DI WILAYAH						
		SUMATERA	JAWA BALI	KALIMANTAN	SULAWESI	NUSA TENGGARA	MALUKU	PAPUA
emisi kendaraan, dan penerbitan peraturan perundangan.								
Pengendalian Kerusakan Lingkungan : Penurunan tingkat polusi keseluruhan sebesar 50% pada 2014 <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan operasional pengawasan sumber daya perikanan. • Peningkatan operasional pengawasan sumber daya kelautan. 	Departemen Kelautan dan Perikanan	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya usaha perikanan yang sesuai ketentuan. • Meningkatnya wilayah perairan Indonesia yang bebas kegiatan ilegal dan merusak. 						
Pengendalian Kerusakan Lingkungan <ul style="list-style-type: none"> • Penghentian kerusakan lingkungan di 13 Daerah Aliran Sungai yang rawan bencana mulai 2010 dan seterusnya. 	Kemeneq Lingkungan Hidup	<ul style="list-style-type: none"> • Persetujuan Penetapan kelas air di tingkat Kab/ Kota (DAS Kampar, Siak, Musi, Batanghari). 	<ul style="list-style-type: none"> • Persetujuan Penetapan kelas air di tingkat Kab/ Kota (DAS Ciliwung, Cisadane, Citarum, Progo, Bengawan Solo). 	<ul style="list-style-type: none"> • Persetujuan Penetapan kelas air di tingkat Kab/ Kota (DAS Barito). 	<ul style="list-style-type: none"> • Persetujuan Penetapan kelas air di tingkat Kab/ Kota (DAS Mamasa). 			
Sistem Peringatan Dini <ul style="list-style-type: none"> • Penjaminan berjalannya fungsi 	BMKG	<ul style="list-style-type: none"> • Terwujudnya kesinambungan sistem 	<ul style="list-style-type: none"> • Terwujudnya kesinambungan sistem 		<ul style="list-style-type: none"> • Terwujudnya kesinambungan sistem 	<ul style="list-style-type: none"> • Terwujudnya kesinambungan sistem pengamatan 	<ul style="list-style-type: none"> • Terwujudnya kesinambungan sistem 	<ul style="list-style-type: none"> • Terwujudnya kesinambungan sistem pengamatan

SUBSTANSI INTI/KEGIATAN PRIORITAS	INSTANSI PELAKSANA	SASARAN PELAKSANAAN DI WILAYAH						
		SUMATERA	JAWA BALI	KALIMANTAN	SULAWESI	NUSA TENGGARA	MALUKU	PAPUA
Sistem Peringatan Dini Tsunami (TEWS), mulai 2010 dan seterusnya.		pengamatan dan analisa data di bidang gempa bumi dan tsunami.	pengamatan dan analisa data di bidang gempa bumi dan tsunami.		pengamatan dan analisa data di bidang gempa bumi dan tsunami.	dan analisa data di bidang gempa bumi dan tsunami.	pengamatan dan analisa data di bidang gempa bumi dan tsunami.	dan analisa data di bidang gempa bumi dan tsunami.
Sistem Peringatan Dini • Penjaminan berjalannya fungsi Sistem Peringatan Dini Cuaca (MEWS) mulai 2010 dan seterusnya.	BMKG	• Meningkatnya pelayanan data dan informasi meteorologi publik serta peringatan dini cuaca ekstrim.						
Sistem Peringatan Dini • Penjaminan berjalannya fungsi Sistem Peringatan Dini Iklim (CEWS) pada 2013.	BMKG	• Meningkatnya pelayanan informasi iklim, agroklimat dan iklim maritim.	• Meningkatnya pelayanan informasi iklim, agroklimat dan iklim maritim.	• Meningkatnya pelayanan informasi iklim, agroklimat dan iklim maritim.	• Meningkatnya pelayanan informasi iklim, agroklimat dan iklim maritim.	• Meningkatnya pelayanan informasi iklim, agroklimat dan iklim maritim.		• Meningkatnya pelayanan informasi iklim, agroklimat dan iklim maritim.
Penanggulangan Bencana • Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah dan masyarakat dalam usaha pengurangan risiko, mitigasi dan penanganan bencana	Bakornas PB	• Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah dan masyarakat	• Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah dan masyarakat		• Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah dan masyarakat	• Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah dan masyarakat dalam usaha pengurangan	• Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah dan	• Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah dan masyarakat dalam usaha pengurangan

SUBSTANSI INTI/KEGIATAN PRIORITYAS	INSTANSI PELAKSANA	SASARAN PELAKSANAAN DI WILAYAH						
		SUMATERA	JAWA BALI	KALIMANTAN	SULAWESI	NUSA TENGGARA	MALUKU	PAPUA
dan bahaya kebakaran hutan.		dalam usaha pengurangan risiko, mitigasi dan penanganan bencana dan bahaya kebakaran hutan.	dalam usaha pengurangan risiko, mitigasi dan penanganan bencana dan bahaya kebakaran hutan.		dalam usaha pengurangan risiko, mitigasi dan penanganan bencana dan bahaya kebakaran hutan.	risiko, mitigasi dan penanganan bencana dan bahaya kebakaran hutan.	masyarakat dalam usaha pengurangan risiko, mitigasi dan penanganan bencana dan bahaya kebakaran hutan.	risiko, mitigasi dan penanganan bencana dan bahaya kebakaran hutan.
Penanggulangan Bencana • Penyiapan peralatan dan logistik di kawasan rawan bencana.	Bakornas PB	• Tersedianya peralatan dan logistik di kawasan rawan bencana.	• Tersedianya peralatan dan logistik di kawasan rawan bencana.		• Tersedianya peralatan dan logistik di kawasan rawan bencana.	• Tersedianya peralatan dan logistik di kawasan rawan bencana.	• Tersedianya peralatan dan logistik di kawasan rawan bencana.	• Tersedianya peralatan dan logistik di kawasan rawan bencana.
Kapasitas : Peningkatan kapasitas aparaturn pemerintah dan masyarakat dalam usaha pengurangan risiko, mitigasi dan penanganan bencana dan bahaya kebakaran hutan di 33	Dep.Kelautan dan perikanan	<ul style="list-style-type: none"> • Terkelolanya kawasan minapolitan yang tahan terhadap ancaman kerusakan dan mempunyai infrastruktur dasar, serta produk kelautan. • Wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil yang teridentifikasi potensi, karakteristik, kebutuhan konservasi SDNHL dan fenomena alamnya serta jumlah rekomendasi pengelolaan dan model pemanfaatannya. 						
			• Lokasi : Jawa					

SUBSTANSI INTI/KEGIATAN PRIORITAS	INSTANSI PELAKSANA	SASARAN PELAKSANAAN DI WILAYAH						
		SUMATERA	JAWA BALI	KALIMANTAN	SULAWESI	NUSA TENGGARA	MALUKU	PAPUA
propinsi <ul style="list-style-type: none"> • Pendayagunaan pesisir dan lautan. • Penelitian dan pengembangan IPTEK kewilayahan, dinamika dan sumber daya Non hayati pesisir dan laut. 			Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Bali, DIY, Banten.					

**MATRIKS SINKRONISASI PUSAT DAN DAERAH DALAM PENCAPAIAN PRIORITAS NASIONAL
PRIORITAS 10 : DAERAH TERTINGGAL, TERDEPAN, TERLUAR DAN PASKAKONFLIK**

SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS	INSTANSI PELAKSANA	SASARAN PELAKSANAAN DI WILAYAH						
		SUMATERA	JAWA BALI	KALIMANTAN	SULAWESI	NUSA TENGGARA	MALUKU	PAPUA
Kebijakan <ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan kebijakan khusus dalam bidang infrastruktur dan pendukung kesejahteraan lainnya yang dapat mendorong pertumbuhan di daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan pasca-konflik. 	Kementerian NakerTrans	•Penyediaan Tanah Transmigrasi di 22 Kab.		•Penyediaan Tanah Transmigrasi di 17 Kab.	•Penyediaan Tanah Transmigrasi di 28 Kab.	•Penyediaan Tanah Transmigrasi di 21 Kab.	•Penyediaan Tanah Transmigrasi di 11 Kab.	•Penyediaan Tanah Transmigrasi di 13 Kab.

SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS	INSTANSI PELAKSANA	SASARAN PELAKSANAAN DI WILAYAH						
		SUMATERA	JAWA BALI	KALIMANTAN	SULAWESI	NUSA TENGGARA	MALUKU	PAPUA
Kebijakan <ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan kebijakan khusus dalam bidang infrastruktur dan pendukung kesejahteraan lainnya yang dapat mendorong pertumbuhan di daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan pasca-konflik. 	Kementerian NakerTrans	<ul style="list-style-type: none"> •Penyusunan Rencana Pembangunan Kawasan Transmigrasi dan Penempatan Transmigrasi di 22 Kab. 		<ul style="list-style-type: none"> •Penyusunan Rencana Pembangunan Kawasan Transmigrasi dan Penempatan Transmigrasi di 17 Kab. 	<ul style="list-style-type: none"> •Penyusunan Rencana Pembangunan Kawasan Transmigrasi dan Penempatan Transmigrasi di 28 Kab. 	<ul style="list-style-type: none"> •Penyusunan Rencana Pembangunan Kawasan Transmigrasi dan Penempatan Transmigrasi di 21 Kab. 	<ul style="list-style-type: none"> •Penyusunan Rencana Pembangunan Kawasan Transmigrasi dan Penempatan Transmigrasi di 11 Kab. 	<ul style="list-style-type: none"> •Penyusunan Rencana Pembangunan Kawasan Transmigrasi dan Penempatan Transmigrasi di 13 Kab.
Kebijakan <ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan kebijakan khusus dalam bidang infrastruktur dan pendukung kesejahteraan lainnya yang dapat mendorong pertumbuhan di daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan pasca-konflik. 	Kementerian NakerTrans	<ul style="list-style-type: none"> •Pembangunan Permukiman di Kawasan Transmigrasi di 22 Kab. 		<ul style="list-style-type: none"> •Pembangunan Permukiman di Kawasan Transmigrasi di 17 Kab. 	<ul style="list-style-type: none"> •Pembangunan Permukiman di Kawasan Transmigrasi di 28 Kab. 	<ul style="list-style-type: none"> •Pembangunan Permukiman di Kawasan Transmigrasi di 21 Kab. 	<ul style="list-style-type: none"> •Pembangunan Permukiman di Kawasan Transmigrasi di 11 Kab. 	<ul style="list-style-type: none"> •Pembangunan Permukiman di Kawasan Transmigrasi di 13 Kab.
Kebijakan <ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan kebijakan khusus dalam bidang infrastruktur dan pendukung kesejahteraan lainnya yang dapat mendorong pertumbuhan 	Kementerian NakerTrans	<ul style="list-style-type: none"> •Fasilitasi Perpindahan dan Penempatan Transmigrasi di 22 Kab. 		<ul style="list-style-type: none"> •Fasilitasi Perpindahan dan Penempatan Transmigrasi di 17 Kab. 	<ul style="list-style-type: none"> •Fasilitasi Perpindahan dan Penempatan Transmigrasi di 28 Kab. 	<ul style="list-style-type: none"> •Fasilitasi Perpindahan dan Penempatan Transmigrasi di 21 Kab. 	<ul style="list-style-type: none"> •Fasilitasi Perpindahan dan Penempatan Transmigrasi 	<ul style="list-style-type: none"> •Fasilitasi Perpindahan dan Penempatan Transmigrasi di 13 Kab.

SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS	INSTANSI PELAKSANA	SASARAN PELAKSANAAN DI WILAYAH						
		SUMATERA	JAWA BALI	KALIMANTAN	SULAWESI	NUSA TENGGARA	MALUKU	PAPUA
di daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan pasca-konflik.							di 11 Kab.	
<p>Kebijakan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan kebijakan khusus dalam bidang infrastruktur dan pendukung kesejahteraan lainnya yang dapat mendorong pertumbuhan di daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan pasca-konflik. 	Kementerian NakerTrans	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan Peran Serta Masyarakat dalam Pembangunan Transmigrasi di 22 Kab. 		<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan Peran Serta Masyarakat dalam Pembangunan Transmigrasi di 17 Kab. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan Peran Serta Masyarakat dalam Pembangunan Transmigrasi di 28 Kab. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan Peran Serta Masyarakat dalam Pembangunan Transmigrasi di 21 Kab. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan Peran Serta Masyarakat dalam Pembangunan Transmigrasi di 11 Kab. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan Peran Serta Masyarakat dalam Pembangunan Transmigrasi di 13 Kab.
<p>Kebijakan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan kebijakan khusus dalam bidang infrastruktur dan pendukung kesejahteraan lainnya yang dapat mendorong pertumbuhan di daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan pasca-konflik. 	Kementerian NakerTrans	<ul style="list-style-type: none"> • Perencanaan Teknis Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi di 31 Kab. 		<ul style="list-style-type: none"> • Perencanaan Teknis Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi di 14 Kab. 	<ul style="list-style-type: none"> • Perencanaan Teknis Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi di 27 Kab. 	<ul style="list-style-type: none"> • Perencanaan Teknis Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi di 14 Kab. 	<ul style="list-style-type: none"> • Perencanaan Teknis Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi di 11 Kab. 	<ul style="list-style-type: none"> • Perencanaan Teknis Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi di 11 Kab.
<p>Kebijakan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan kebijakan khusus dalam bidang infrastruktur dan pendukung kesejahteraan lainnya yang dapat mendorong 	Kementerian NakerTrans	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Masyarakat di Kawasan 		<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Masyarakat di Kawasan 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Masyarakat di 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Masyarakat di Kawasan 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Masyarakat di 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Masyarakat di Kawasan

SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS	INSTANSI PELAKSANA	SASARAN PELAKSANAAN DI WILAYAH						
		SUMATERA	JAWA BALI	KALIMANTAN	SULAWESI	NUSA TENGGARA	MALUKU	PAPUA
pertumbuhan di daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan pasca-konflik.		Transmigrasi di 31 Kab.		Transmigrasi di 14 Kab.	Kawasan Transmigrasi di 27 Kab.	Transmigrasi di 14 Kab.	Kawasan Transmigrasi di 11 Kab.	Transmigrasi di 11 Kab.
<p>Kebijakan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan kebijakan khusus dalam bidang infrastruktur dan pendukung kesejahteraan lainnya yang dapat mendorong pertumbuhan di daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan pasca-konflik. 	Kementerian NakerTrans	•Pengembangan Usaha di Kawasan Transmigrasi di 31 Kab.		•Pengembangan Usaha di Kawasan Transmigrasi di 14 Kab.	•Pengembangan Usaha di Kawasan Transmigrasi di 27 Kab.	•Pengembangan Usaha di Kawasan Transmigrasi di 14 Kab.	•Pengembangan Usaha di Kawasan Transmigrasi di 11 Kab.	•Pengembangan Usaha di Kawasan Transmigrasi di 11 Kab.
<p>Kebijakan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan kebijakan khusus dalam bidang infrastruktur dan pendukung kesejahteraan lainnya yang dapat mendorong pertumbuhan di daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan pasca-konflik. 	Kementerian NakerTrans	•Pengembangan Sarana dan Prasarana di Kawasan Transmigrasi di 31 Kab.		•Pengembangan Sarana dan Prasarana di Kawasan Transmigrasi di 14 Kab.	•Pengembangan Sarana dan Prasarana di Kawasan Transmigrasi di 27 Kab.	•Pengembangan Sarana dan Prasarana di Kawasan Transmigrasi di 14 Kab.	•Pengembangan Sarana dan Prasarana di Kawasan Transmigrasi di 11 Kab.	•Pengembangan Sarana dan Prasarana di Kawasan Transmigrasi di 11 Kab.
Kebijakan	Kementerian NakerTrans	•Penyerasian		•Penyerasian	•Penyerasian	•Penyerasian	•Penyerasian	•Penyerasian

SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS	INSTANSI PELAKSANA	SASARAN PELAKSANAAN DI WILAYAH						
		SUMATERA	JAWA BALI	KALIMANTAN	SULAWESI	NUSA TENGGARA	MALUKU	PAPUA
<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan kebijakan khusus dalam bidang infrastruktur dan pendukung kesejahteraan lainnya yang dapat mendorong pertumbuhan di daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan pasca-konflik. 		Lingkungan di Kawasan Transmigrasi di 31 Kab.		Lingkungan di Kawasan Transmigrasi di 14 Kab.	Lingkungan di Kawasan Transmigrasi di 27 Kab.	Lingkungan di Kawasan Transmigrasi di 14 Kab.	Lingkungan di Kawasan Transmigrasi di 11 Kab.	Lingkungan di Kawasan Transmigrasi di 11 Kab.
Kebijakan <ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan kebijakan khusus dalam bidang infrastruktur dan pendukung kesejahteraan lainnya yang dapat mendorong pertumbuhan di daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan pasca-konflik. 	Kementerian PU	<ul style="list-style-type: none"> • Tersediannya sarana dan prasarana jalan di daerah perbatasan, pulau terdepan atau terluar. 						
Kebijakan <ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan kebijakan khusus dalam bidang infrastruktur dan pendukung kesejahteraan lainnya yang dapat mendorong pertumbuhan di daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan pasca- 	Kementerian PU	<ul style="list-style-type: none"> • Terselenggaranya Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat di bidang transportasi jalan perdesaan. 						

SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS	INSTANSI PELAKSANA	SASARAN PELAKSANAAN DI WILAYAH						
		SUMATERA	JAWA BALI	KALIMANTAN	SULAWESI	NUSA TENGGARA	MALUKU	PAPUA
konflik.								
Kebijakan <ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan kebijakan khusus dalam bidang infrastruktur dan pendukung kesejahteraan lainnya yang dapat mendorong pertumbuhan di daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan pasca-konflik. 	Kementerian Perhubungan							<ul style="list-style-type: none"> •Pembangunan 700 unit bus perintis, 20 unit kapal perintis, dan 18 pesawat perintis serta subsidi/ PSO di perintis 118 lintas darat per tahun, 17 provinsi/67 trayek laut per tahun, dan 17 provinsi/100 rute per tahun (Nasional).
Kebijakan <ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan kebijakan khusus dalam bidang infrastruktur dan pendukung kesejahteraan lainnya yang dapat mendorong pertumbuhan di daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan pasca-konflik. 	Kementerian Perhubungan							<ul style="list-style-type: none"> •Terkelolanya sarana dan fasilitas bandar udara perintis, pelabuhan perintis, dan penyebrangan perintis.
Kebijakan <ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan kebijakan khusus 	Kementerian Kesehatan							<ul style="list-style-type: none"> •Meningkatnya perencanaan dan pendayagunaan SDM Kesehatan (tenaga kesehatan dan residen senior) di kab daerah tertinggal, perbatasan dan

SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS	INSTANSI PELAKSANA	SASARAN PELAKSANAAN DI WILAYAH						
		SUMATERA	JAWA BALI	KALIMANTAN	SULAWESI	NUSA TENGGARA	MALUKU	PAPUA
dalam bidang infrastruktur dan pendukung kesejahteraan lainnya yang dapat mendorong pertumbuhan di daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan pasca-konflik.		kepulauan (DTPK).						
		•46 kab.	•5 kab.	•15 kab.	•38 kab.	•27 kab.	•16 kab.	•36 kab.
Kebijakan • Pelaksanaan kebijakan khusus dalam bidang infrastruktur dan pendukung kesejahteraan lainnya yang dapat mendorong pertumbuhan di daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan pasca-konflik.	Kementerian Kesehatan	•Meningkatnya pelayanan medik spesialistik kepada masyarakat melalui RS bergerak di kab daerah tertinggal, perbatasan dan kepulauan (DTPK).						
		•46 kab.	•5 kab.	•15 kab.	•38 kab.	•27 kab.	•16 kab.	•36 kab.
Kebijakan • Pelaksanaan kebijakan khusus dalam bidang infrastruktur dan pendukung kesejahteraan lainnya yang dapat mendorong pertumbuhan di daerah tertinggal,	Kementerian Kesehatan	•Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan melalui puskesmas perawatan di kab daerah tertinggal, perbatasan dan kepulauan (DTPK).						
		•46 kab.	•5 kab.	•15 kab.	•38 kab.	•27 kab.	•16 kab.	•36 kab.

SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS	INSTANSI PELAKSANA	SASARAN PELAKSANAAN DI WILAYAH						
		SUMATERA	JAWA BALI	KALIMANTAN	SULAWESI	NUSA TENGGARA	MALUKU	PAPUA
terdepan, terluar, dan pasca-konflik.								
Kebijakan : <ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan kebijakan khusus dalam bidang infrastruktur dan pendukung kesejahteraan lainnya yang dapat mendorong pertumbuhan di daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan pasca-konflik. 	Dep Dalam Negeri	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya sarpras perbatasan antar negara dan pulau-pulau terluar dalam rangka pelayanan umum pemerintahan. 		<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya sarpras perbatasan antar negara dan pulau-pulau terluar dalam rangka pelayanan umum pemerintahan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya sarpras perbatasan antar negara dan pulau-pulau terluar dalam rangka pelayanan umum pemerintahan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya sarpras perbatasan antar negara dan pulau-pulau terluar dalam rangka pelayanan umum pemerintahan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya sarpras perbatasan antar negara dan pulau-pulau terluar dalam rangka pelayanan umum pemerintahan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya sarpras perbatasan antar negara dan pulau-pulau terluar dalam rangka pelayanan umum pemerintahan.
Kebijakan : Pelaksanaan kebijakan khusus dalam bidang infrastruktur dan pendukung kesejahteraan lainnya yang dapat mendorong pertumbuhan di daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan pasca-konflik <ul style="list-style-type: none"> • Pendayagunaan Pulau-Pulau Kecil. 	Dep Kelautan dan Perikanan	<ul style="list-style-type: none"> • Terwujudnya pulau kecil yang memiliki infrastruktur memadai, ekosistem baik, siap terhadap bencana, dan di antaranya terinvestasi. 						

SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS	INSTANSI PELAKSANA	SASARAN PELAKSANAAN DI WILAYAH						
		SUMATERA	JAWA BALI	KALIMANTAN	SULAWESI	NUSA TENGGARA	MALUKU	PAPUA
Kebijakan <ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan kebijakan khusus dalam bidang infrastruktur dan pendukung kesejahteraan lainnya yang dapat mendorong pertumbuhan di daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan pasca-konflik. 	Dep Kelautan dan Perikanan	<ul style="list-style-type: none"> •Pendayagunaan pulau-pulau kecil. 						
Kebijakan <ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan kebijakan khusus dalam bidang infrastruktur dan pendukung kesejahteraan lainnya yang dapat mendorong pertumbuhan di daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan pasca-konflik. 	Kementerian PU	<ul style="list-style-type: none"> •Pembangunan Prasarana dan Sarana Permukiman di Desa Tertinggal di Kab. Pesisir Selatan; Kab. Solok Selatan; , Kab. Lingga; Kab. Anambas; Kab. Banyuasin; Kab. 		<ul style="list-style-type: none"> •Pembangunan Prasarana dan Sarana Permukiman di Desa Tertinggal : Kab. Bengkayang; Kab. Kayong Utara; Kab. Gunung Mas; Kab. Pulau Pisang; Kab. HSU. 	<ul style="list-style-type: none"> •Pembangunan Prasarana dan Sarana Permukiman di Desa Tertinggal : Kab. Polman; Kab. Mamuju; Kab. Bombana; Kab. Buton; Kab. Selayar; Kab. Banggai, 	<ul style="list-style-type: none"> •Pembangunan Prasarana dan Sarana Permukiman di Desa Tertinggal : Kab. Lombok Barat; Kab. Lombok Utara; Kab. TTU; Kab. Sumba Barat. 	<ul style="list-style-type: none"> •Pembangunan Prasarana dan Sarana Permukiman di Desa Tertinggal: Kab. MTB. 	

SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS	INSTANSI PELAKSANA	SASARAN PELAKSANAAN DI WILAYAH						
		SUMATERA	JAWA BALI	KALIMANTAN	SULAWESI	NUSA TENGGARA	MALUKU	PAPUA
		OKU; Kab. Ogan Ilir; Kab. Belitung; Kab. Bangka Selatan.			Kab. Bangkep; Kab. Pangkep.			
<p>Kebijakan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan kebijakan khusus dalam bidang infrastruktur dan pendukung kesejahteraan lainnya yang dapat mendorong pertumbuhan di daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan pasca-konflik. 	Kementerian PU	<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan Prasarana dan Sarana Permukiman di Kawasan Perbatasan dan pulau kecil terluar di Kab. Aceh Besar; Kab. Aceh Jaya; Pulau Rupa; Kws. Pasir Limau Kapas; Anambas; Kota Batam; Kab. Natuna. 		<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan Prasarana dan Sarana Permukiman di Kawasan Perbatasan dan pulau kecil terluar : Kab. Kapuas Hulu; Kab. Sambas; Kab. Sanggau; Kab. Sintang; Kab. Nunukan; Kab. Kutai Barat. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan Prasarana dan Sarana Permukiman di Kawasan Perbatasan dan pulau kecil terluar : Kab. Kep. Sitaro; Kab. Kep. Sangihe. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan Prasarana dan Sarana Permukiman di Kawasan Perbatasan dan pulau kecil terluar : Kab. Kupang; Kab. Rote Ndao; Kab. Belu; Kab. Alor. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan Prasarana dan Sarana Permukiman di Kawasan Perbatasan dan pulau kecil terluar: Kab. MBD; Kab. MTB; Kab. Halut; Kawasan P. Morotai. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan Prasarana dan Sarana Permukiman di Kawasan Perbatasan dan pulau kecil terluar : Kab. Boven Digul; Kab. Raja Ampat Kp. Dorekar; P. Fani.
<p>Kebijakan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan kebijakan khusus dalam bidang infrastruktur dan pendukung kesejahteraan lainnya yang dapat mendorong 	Kementerian PU	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan kapasitas produksi air minum terpasang khusus untuk me-nangani 		<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan kapasitas produksi air minum terpasang khusus untuk menangani kawasan 	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan Kapasitas produksi air minum terpasang 	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan Kapasitas produksi air minum terpasang khusus untuk menangani kawasan 	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan Kapasitas produksi air minum terpasang 	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan kapasitas produksi air minum terpasang khusus untuk menangani kawasan

SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS	INSTANSI PELAKSANA	SASARAN PELAKSANAAN DI WILAYAH						
		SUMATERA	JAWA BALI	KALIMANTAN	SULAWESI	NUSA TENGGARA	MALUKU	PAPUA
pertumbuhan di daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan pasca-konflik.		kawasan pemekaran, pulau terluar, perbatasan, terpencil.		pemekaran, pulau terluar, perbatasan, terpencil.	khusus untuk menangani kawasan pemekaran, pulau terluar, perbatasan, terpencil : Sulut.	pemekaran, pulau terluar, perbatasan, terpencil.	khusus untuk menangani kawasan pemekaran, pulau terluar, perbatasan, terpencil: Maluku, Malut.	pemekaran, pulau terluar, perbatasan, terpencil.
<p>Kebijakan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan kebijakan khusus dalam bidang infrastruktur dan pendukung kesejahteraan lainnya yang dapat mendorong pertumbuhan di daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan pasca-konflik. 	Kemeng PDT	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan kebijakan dan koordinasi daerah tertinggal di kawasan perbatasan di Kab Kepulauan Riau. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan Prasarana dan Sarana Permukiman di Desa Tertinggal : P. Pewahang, Kab. Serang; P. Tunda/ P. Panjang, Kabupaten Jepara; Kabupaten Semarang; Kabupaten Kendal; Kab. Klungkung; Kab. Karangasem. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan kebijakan dan koordinasi daerah tertinggal di kawasan perbatasan di Kab Bengkayang, Kapuas hulu, Sanggau, Sintang. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan kebijakan dan koordinasi daerah tertinggal di kawasan perbatasan di Kab Kep Sangihe & KepTalaud. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan kebijakan dan koordinasi daerah tertinggal di kawasan perbatasan di Kab Alor, Belu, Rote Ndao, Timor Tengah Utara. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan kebijakan dan koordinasi daerah tertinggal di kawasan perbatasan di Kab Kep Aru, Maluku Barat Daya, Maluku Tenggara Barat, Morotai. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan kebijakan dan koordinasi daerah tertinggal di kawasan perbatasan Boven Digoel, Keerom, Merauke, Pegunungan Bintang, Supiori, Raja Ampat.

SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS	INSTANSI PELAKSANA	SASARAN PELAKSANAAN DI WILAYAH						
		SUMATERA	JAWA BALI	KALIMANTAN	SULAWESI	NUSA TENGGARA	MALUKU	PAPUA
Kebijakan <ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan kebijakan khusus dalam bidang infrastruktur dan pendukung kesejahteraan lainnya yang dapat mendorong pertumbuhan di daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan pasca-konflik. 	BPPT	<ul style="list-style-type: none"> •Rekomendasi dan Pilot Plan dalam Teknologi Efisiensi Pemanfaatan Sumberdaya Air. 						
Kebijakan <ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan kebijakan khusus dalam bidang infrastruktur dan pendukung kesejahteraan lainnya yang dapat mendorong pertumbuhan di daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan pasca-konflik. 	BPPT	<ul style="list-style-type: none"> •Pengembangan tenaga listrik surya dengan daya kecil untuk penerangan, melalui pembuatan Modul tenaga listrik surya daya tertentu. 						
Kerjasama Internasional <ul style="list-style-type: none"> • Pembentukan kerjasama dengan negara-negara tetangga dalam rangka pengamanan wilayah dan sumber daya kelautan. 	Kementerian Dalam Negeri	<ul style="list-style-type: none"> •Meningkatnya kerjasama perbatasan antar negara (SOSEKMALINDO, JBC RI-RDTL, 		<ul style="list-style-type: none"> •Meningkatnya kerjasama perbatasan antar negara (SOSEKMALINDO, JBC RI-RDTL, JBC RI-PNG) di Kalbar, 		<ul style="list-style-type: none"> •Meningkatnya kerjasama perbatasan antar negara (SOSEKMALINDO, JBC RI-RDTL, JBC RI-PNG) di NTT. 		<ul style="list-style-type: none"> •Meningkatnya kerjasama perbatasan antar negara (SOSEKMALINDO, JBC RI-RDTL,

SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITY	INSTANSI PELAKSANA	SASARAN PELAKSANAAN DI WILAYAH						
		SUMATERA	JAWA BALI	KALIMANTAN	SULAWESI	NUSA TENGGARA	MALUKU	PAPUA
		JBC RI-PNG) di Riau, Kepri.		Kaltim.				JBC RI-PNG) di Papua.
Kerjasama Internasional • Pembentukan kerjasama dengan negara-negara tetangga dalam rangka pengamanan wilayah dan sumber daya kelautan.	Kementerian Pertahanan/ TNI	•Terbangunnya Kerjasama Indonesia – Malaysia dalam bentuk Patroli Terkoordinasi (Patkor Malindo) di Selat Malaka.						
Kerjasama Internasional • Pembentukan kerjasama dengan negara-negara tetangga dalam rangka pengamanan wilayah dan sumber daya kelautan.	Kementerian Pertahanan/ TNI	•Terbangunnya Kerjasama keamanan Laut dengan menggelar operasi bersama trilateral Coordinate Patrol Malsindo (Indonesia-Malaysia-Singapura.		•Terbangunnya Kerjasama keamanan Laut dengan menggelar operasi bersama trilateral Coordinate Patrol Malsindo (Indonesia-Malaysia-Singapura.				
Kerjasama Internasional	Kementerian Pertahanan/	•Terbangunnya						

SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS	INSTANSI PELAKSANA	SASARAN PELAKSANAAN DI WILAYAH						
		SUMATERA	JAWA BALI	KALIMANTAN	SULAWESI	NUSA TENGGARA	MALUKU	PAPUA
<ul style="list-style-type: none"> Pembentukan kerjasama dengan negara-negara tetangga dalam rangka pengamanan wilayah dan sumber daya kelautan. 	TNI	Kerjasama Indonesia – Thailand dalam penanganan pelintas batas.						
Kerjasama Internasional <ul style="list-style-type: none"> Pembentukan kerjasama dengan negara-negara tetangga dalam rangka pengamanan wilayah dan sumber daya kelautan. 	Kementerian Pertahanan/ TNI	<ul style="list-style-type: none"> Terbangunnya Kerjasama Indonesia – India dalam bentuk Patroli Terkoordinasi (Patkor Indindo). 			<ul style="list-style-type: none"> Terbangunnya Kerjasama Indonesia – Filipina dalam bentuk Patroli Terkoordinasi (Patkor Indindo). 			
Kerjasama Internasional <ul style="list-style-type: none"> Pembentukan kerjasama dengan negara-negara tetangga dalam rangka pengamanan wilayah dan sumber daya kelautan. 	Kementerian Pertahanan/ TNI	<ul style="list-style-type: none"> Adanya Liasion Officer di Negara Tertangga yang berbatasan dengan Indonesia. 		<ul style="list-style-type: none"> Adanya Liasion Officer di Negara Tertangga yang berbatasan dengan Indonesia. 	<ul style="list-style-type: none"> Adanya Liasion Officer di Negara Tertangga yang berbatasan dengan Indonesia. 		<ul style="list-style-type: none"> Adanya Liasion Officer di Negara Tertangga yang berbatasan 	<ul style="list-style-type: none"> Adanya Liasion Officer di Negara Tertangga yang berbatasan dengan Indonesia.

SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS	INSTANSI PELAKSANA	SASARAN PELAKSANAAN DI WILAYAH						
		SUMATERA	JAWA BALI	KALIMANTAN	SULAWESI	NUSA TENGGARA	MALUKU	PAPUA
							dengan Indonesia.	
<p>Kerjasama Internasional</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembentukan kerjasama dengan negara-negara tetangga dalam rangka pengamanan wilayah dan sumber daya kelautan. 	Kementerian Kelautan dan Perikanan	<ul style="list-style-type: none"> • Pengelolaan dan pengembangan konservasi kawasan dan jenis CTI (Kepri). 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengelolaan dan pengembangan konservasi kawasan dan jenis CTI (Bali). 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengelolaan dan pengembangan konservasi kawasan dan jenis CTI (Kaltim). 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengelolaan dan pengembangan konservasi kawasan dan jenis CTI (Sulut, Sultra). 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengelolaan dan pengembangan konservasi kawasan dan jenis CTI (NTT). 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengelolaan dan pengembangan konservasi kawasan dan jenis CTI (Maluku). 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengelolaan dan pengembangan konservasi kawasan dan jenis CTI (Papua, Papua Barat).
<p>Kerjasama Internasional</p> <p>Pembentukan kerjasama dengan negara-negara tetangga dalam rangka pengamanan wilayah dan sumber daya kelautan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan operasional dan pemeliharaan kapal pengawas. • Pengembangan sarana dan prasarana pengawasan dan Pemantauan Kapal Perikanan. 	Kementerian Kelautan dan Perikanan	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan wilayah pengelolaan perikanan bebas IUU fishing. • Terpenuhi sarana dan prasarana pengawasan dengan rancang bangun dan sistem pemantauan yang terintegrasi dan 	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan wilayah pengelolaan perikanan bebas IUU fishing. • Terpenuhi sarana dan prasarana pengawasan dengan rancang bangun dan sistem pemantauan yang terintegrasi dan 	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan wilayah pengelolaan perikanan bebas IUU fishing. • Terpenuhi sarana dan prasarana pengawasan dengan rancang bangun dan sistem pemantauan yang terintegrasi dan tepat sasaran. • Meningkatkan operasional kapal 	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan wilayah pengelolaan perikanan bebas IUU fishing. • Terpenuhi sarana dan prasarana pengawasan dengan rancang bangun dan sistem pemantauan yang terintegrasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan wilayah pengelolaan perikanan bebas IUU fishing. • Terpenuhi sarana dan prasarana pengawasan dengan rancang bangun dan sistem pemantauan yang terintegrasi dan tepat sasaran. • Meningkatkan operasional kapal 	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan wilayah pengelolaan perikanan bebas IUU fishing. • Terpenuhi sarana dan prasarana pengawasan dengan rancang bangun dan sistem pemantauan yang terintegrasi dan tepat sasaran. 	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan wilayah pengelolaan perikanan bebas IUU fishing. • Terpenuhi sarana dan prasarana pengawasan dengan rancang bangun dan sistem pemantauan yang terintegrasi dan tepat sasaran.

SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS	INSTANSI PELAKSANA	SASARAN PELAKSANAAN DI WILAYAH						
		SUMATERA	JAWA BALI	KALIMANTAN	SULAWESI	NUSA TENGGARA	MALUKU	PAPUA
		<p>tepat sasaran.</p> <ul style="list-style-type: none"> •Meningkatnya operasional kapal pengawas (Kep. Anambas, Kep. Hinako, Mentawai, P. Natuna, P. Karang Tembaga, Batam, Kep. Simalue, KKLD Sokong Siembah, KKLD P. Kaisak, P. Mundu, KKLD Sukanegara, KKLD Tapanuli Utara). 	<p>tepat sasaran.</p> <ul style="list-style-type: none"> •Meningkatnya operasional kapal pengawas (P. Menjangan, P. Serangan, KKLD Karang Gundul, Kep. Karimun Jawa, KKLD Camara, P. Sapeken, Serangan, KKLD Ciamis). 	<p>pengawas (KKLD Kakaban, KKLD P. Sembilan, KKLD P. Kabung).</p>	<p>dan tepat sasaran.</p> <ul style="list-style-type: none"> •Kerjasama Konservasi Nasional, Regional dan Internasional SSME (Sulawesi), BSME (Sulawesi). •Meningkatnya operasional kapal pengawas (P. Marore, KKLD P. Liwung Tongkidi, Kep. Spermonde). 	<p>pengawas (Kab. Sumbawa, KKLD P. Alor Besar, KKLD P. Kepa, KKLD P. Lawang, Kep. Kojadoi).</p>	<p>pemantauan yang terintegrasi dan tepat sasaran.</p> <ul style="list-style-type: none"> •Meningkatnya operasional kapal pengawas (P. Ternate, P. Wetar). 	<ul style="list-style-type: none"> •Meningkatnya operasional kapal pengawas (KKLD Raja Ampat, KKLD Teluk Mayabilit).
<p>Keutuhan Wilayah</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penyelesaian pemetaan wilayah perbatasan RI dengan Malaysia, 	Kementerian Dalam Negeri	<ul style="list-style-type: none"> •Terfasilitasinya penguatan kelembagaan 		<ul style="list-style-type: none"> •Terfasilitasinya penguatan kelembagaan wilayah 	<ul style="list-style-type: none"> •Terfasilitasinya penguatan kelembagaan 	<ul style="list-style-type: none"> •Terfasilitasinya penguatan kelembagaan wilayah 	<ul style="list-style-type: none"> •Terfasilitasinya a penguatan kelembagaan 	<ul style="list-style-type: none"> •Terfasilitasinya penguatan kelembagaan

SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS	INSTANSI PELAKSANA	SASARAN PELAKSANAAN DI WILAYAH						
		SUMATERA	JAWA BALI	KALIMANTAN	SULAWESI	NUSA TENGGARA	MALUKU	PAPUA
Papua Nugini, Timor Leste, dan Filipina pada 2010.		wilayah perbatasan antar negara di Kepri, Riau.		perbatasan antar negara di Kalbar, Kaltim.	wilayah perbatasan antar negara di Sulut.	perbatasan antar negara di NTT.	wilayah perbatasan antar negara di Maluku.	wilayah perbatasan antar negara di Papua.
Keutuhan Wilayah • Penyelesaian pemetaan wilayah perbatasan RI dengan Malaysia, Papua Nugini, Timor Leste, dan Filipina pada 2010.	Kementerian Luar Negeri	•Perundingan penetapan batas maritim Indonesia-Singapura sampai tahun 2014 sebanyak 10 kali.			•Perundingan penetapan batas maritim Indonesia-Singapura sampai tahun 2014 sebanyak 10 kali.	•Perundingan penetapan batas maritim Indonesia-Singapura sampai tahun 2014 sebanyak 10 kali.		•Perundingan penetapan batas maritim Indonesia-Singapura sampai tahun 2014 sebanyak 10 kali.
Keutuhan Wilayah • Penyelesaian pemetaan wilayah perbatasan RI dengan Malaysia, Papua Nugini, Timor Leste, dan Filipina pada 2010.	Kementerian Luar Negeri	•Perundingan penetapan batas maritim Indonesia-Vietnam sampai tahun 2014 sebanyak 10 kali.			•Perundingan penetapan batas maritim Indonesia-Vietnam sampai tahun 2014 sebanyak 10 kali.	•Perundingan penetapan batas maritim Indonesia-Vietnam sampai tahun 2014 sebanyak 10 kali.		•Perundingan penetapan batas maritim Indonesia-Vietnam sampai tahun 2014 sebanyak 10 kali.
Keutuhan Wilayah • Penyelesaian pemetaan wilayah	Bakosurtanal	•Pemetaan batas wilayah negara		•Pemetaan batas wilayah negara (joint	•Pemetaan batas wilayah negara	•Pemetaan batas wilayah negara (joint	•	•Pemetaan batas wilayah negara

SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS	INSTANSI PELAKSANA	SASARAN PELAKSANAAN DI WILAYAH						
		SUMATERA	JAWA BALI	KALIMANTAN	SULAWESI	NUSA TENGGARA	MALUKU	PAPUA
perbatasan RI dengan Malaysia, Papua Nugini, Timor Leste, dan Filipina pada 2010.		(joint mapping) koridor perbatasan darat RI-PNG, RI-Malaysia dalam skala 1:50.000.		mapping) koridor perbatasan darat RI-PNG, RI-Malaysia dalam skala 1:50.000.	(joint mapping) koridor perbatasan darat RI-PNG, RI-Malaysia dalam skala 1:50.000.	mapping) koridor perbatasan darat RI-PNG, RI-Malaysia dalam skala 1:50.000.		(joint mapping) koridor perbatasan darat RI-PNG, RI-Malaysia dalam skala 1:50.000.
Keutuhan Wilayah • Penyelesaian pemetaan wilayah perbatasan RI dengan Malaysia, Papua Nugini, Timor Leste, dan Filipina pada 2010.	Bakosurtanal	•Pemetaan kecamatan kawasan perbatasan darat RI-PNG, RI-Malaysia, dan RI-RDTL skala 1:50.000 dan 1:25.000.		•Pemetaan kecamatan kawasan perbatasan darat RI-PNG, RI-Malaysia, dan RI-RDTL skala 1:50.000 dan 1:25.000.	•Pemetaan kecamatan kawasan perbatasan darat RI-PNG, RI-Malaysia, dan RI-RDTL skala 1:50.000 dan 1:25.000.	•Pemetaan kecamatan kawasan perbatasan darat RI-PNG, RI-Malaysia, dan RI-RDTL skala 1:50.000 dan 1:25.000.	•Pemetaan kecamatan kawasan perbatasan darat RI-PNG, RI-Malaysia, dan RI-RDTL skala 1:50.000 dan 1:25.000.	•Pemetaan kecamatan kawasan perbatasan darat RI-PNG, RI-Malaysia, dan RI-RDTL skala 1:50.000 dan 1:25.000.
Keutuhan Wilayah • Penyelesaian pemetaan wilayah perbatasan RI dengan Malaysia, Papua Nugini, Timor Leste, dan Filipina pada 2010.	Bakosurtanal	•Pemetaan pulau-pulau terluar; penataan batas provinsi/kab/kota; pemetaan wilayah provinsi; pemetaan wilayah kabupaten;		•Pemetaan pulau-pulau terluar; penataan batas provinsi/kab/kota; pemetaan wilayah provinsi; pemetaan wilayah kabupaten; pemetaan wilayah kota; Border Sign	•Pemetaan pulau-pulau terluar; penataan batas provinsi/kab/kota; pemetaan wilayah provinsi; pemetaan	•Pemetaan pulau-pulau terluar; penataan batas provinsi/kab/kota; pemetaan wilayah provinsi; pemetaan wilayah kabupaten; pemetaan wilayah kota; Border Sign	•Pemetaan pulau-pulau terluar; penataan batas provinsi/kab/kota; pemetaan wilayah provinsi;	•Pemetaan pulau-pulau terluar; penataan batas provinsi/kab/kota; pemetaan wilayah provinsi; pemetaan wilayah kabupaten; pemetaan wilayah

SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS	INSTANSI PELAKSANA	SASARAN PELAKSANAAN DI WILAYAH						
		SUMATERA	JAWA BALI	KALIMANTAN	SULAWESI	NUSA TENGGARA	MALUKU	PAPUA
		pemetaan wilayah kota; Border Sign Post.		Post.	wilayah kabupaten; pemetaan wilayah kota; Border Sign Post.	Post.	pemetaan wilayah kabupaten; pemetaan wilayah kota; Border Sign Post.	kota; Border Sign Post.
Keutuhan Wilayah • Penyelesaian pemetaan wilayah perbatasan RI dengan Malaysia, Papua Nugini, Timor Leste, dan Filipina pada 2010.	Bakosurtanal	•Perapatan Pilar Batas RI-Malaysia; Perapatan Pilar Batas RI-PNG; Perapatan Pilar Batas RI-RDTL.		•Perapatan Pilar Batas RI-Malaysia; Perapatan Pilar Batas RI-PNG; Perapatan Pilar Batas RI-RDTL.	•Perapatan Pilar Batas RI-Malaysia; Perapatan Pilar Batas RI-PNG; Perapatan Pilar Batas RI-RDTL.	•Perapatan Pilar Batas RI-Malaysia; Perapatan Pilar Batas RI-PNG; Perapatan Pilar Batas RI-RDTL.	•Perapatan Pilar Batas RI-Malaysia; Perapatan Pilar Batas RI-PNG; Perapatan Pilar Batas RI-RDTL.	•Perapatan Pilar Batas RI-Malaysia; Perapatan Pilar Batas RI-PNG; Perapatan Pilar Batas RI-RDTL.
Keutuhan Wilayah • Penyelesaian pemetaan wilayah perbatasan RI dengan Malaysia, Papua Nugini, Timor Leste, dan Filipina pada 2010.	Bakosurtanal	•Perundingan Teknis Batas Darat; Perundingan Teknis Batas Maritim; Kajian LKI>200m.		•Perundingan Teknis Batas Darat; Perundingan Teknis Batas Maritim; Kajian LKI>200m.	•Perundingan Teknis Batas Darat; Perundingan Teknis Batas Maritim; Kajian LKI>200m.	•Perundingan Teknis Batas Darat; Perundingan Teknis Batas Maritim; Kajian LKI>200m.	•Perundingan Teknis Batas Darat; Perundingan Teknis Batas Maritim; Kajian	•Perundingan Teknis Batas Darat; Perundingan Teknis Batas Maritim; Kajian LKI>200m.

SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS	INSTANSI PELAKSANA	SASARAN PELAKSANAAN DI WILAYAH						
		SUMATERA	JAWA BALI	KALIMANTAN	SULAWESI	NUSA TENGGARA	MALUKU	PAPUA
							LKI>200m.	
Keutuhan Wilayah • Penyelesaian pemetaan wilayah perbatasan RI dengan Malaysia, Papua Nugini, Timor Leste, dan Filipina pada 2010.	Bakosurtanal	•Pengkajian dan pemetaan Batas Negara dan Geopolitik.		•Pengkajian dan pemetaan Batas Negara dan Geopolitik.	•Pengkajian dan pemetaan Batas Negara dan Geopolitik.	•Pengkajian dan pemetaan Batas Negara dan Geopolitik.	•Pengkajian dan pemetaan Batas Negara dan Geopolitik.	•Pengkajian dan pemetaan Batas Negara dan Geopolitik.
Keutuhan Wilayah • Penyelesaian pemetaan wilayah perbatasan RI dengan Malaysia, Papua Nugini, Timor Leste, dan Filipina pada 2010.	BPN	•Tersedianya data hasil inventarisasi Wilayah Pesisir, Pulau-Pulau Kecil, Perbatasan dan Wilayah Tertentu (WP3WT).						
Daerah Tertinggal • Pengentasan daerah tertinggal.	Kemeneg PDT	•Pengembangan ekonomi lokal di kab daerah tertinggal.						
		•46 kab.	•5 kab.	•15 kab.	•38 kab.	•27 kab.	•16 kab.	•36 kab.
Daerah Tertinggal	Kemeneg PDT	•Penguatan kelembagaan masyarakat dan pemda dalam pengelolaan sumberdaya lokal di kab daerah tertinggal.						

SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS	INSTANSI PELAKSANA	SASARAN PELAKSANAAN DI WILAYAH						
		SUMATERA	JAWA BALI	KALIMANTAN	SULAWESI	NUSA TENGGARA	MALUKU	PAPUA
• Pengentasan daerah tertinggal.		•46 kab.	•5 kab.	•15 kab.	•38 kab.	•27 kab.	•16 kab.	•36 kab.
Daerah Tertinggal • Pengentasan daerah tertinggal.	Kemeneg PDT	•Peningkatan pelayanan Kesehatan yang berkualitas dan terjangkau di Daerah Tertinggal di kab daerah tertinggal.						
		•46 kab.	•5 kab.	•15 kab.	•38 kab.	•27 kab.	•16 kab.	•36 kab.
Daerah Tertinggal • Pengentasan daerah tertinggal.	Kemeneg PDT	•Peningkatan pelayanan pendidikan di Daerah Tertinggal di kab daerah tertinggal.						
		•46 kab.	•5 kab.	•15 kab.	•38 kab.	•27 kab.	•16 kab.	•36 kab.
Daerah Tertinggal • Pengentasan daerah tertinggal.	Kemeneg PDT	•Peningkatan sarana dan prasarana penyediaan energi listrik, telekomunikasi, irigasi, dan air bersih di kab daerah tertinggal.						
		•46 kab.	•5 kab.	•15 kab.	•38 kab.	•27 kab.	•16 kab.	•36 kab.
Daerah Tertinggal • Pengentasan daerah tertinggal.	Kemeneg PDT	•Peningkatan aksesibilitas daerah tertinggal dengan pusat pertumbuhan di kab daerah tertinggal.						
		•46 kab.	•5 kab.	•15 kab.	•38 kab.	•27 kab.	•16 kab.	•36 kab.
Daerah Tertinggal • Pengentasan daerah tertinggal.	Kementerian Sosial	•Peremberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT).						
		•68 kab.	•19 kab.	•38 kab.	•44 kab.	•19 kab.	•12 kab.	•27 kab.

**MATRIKS SINKRONISASI PUSAT DAN DAERAH DALAM PENCAPAIAN PRIORITAS NASIONAL
PRIORITAS 11 : KEBUDAYAAN, KREATIVITAS, DAN INOVASI TEKNOLOGI**

SUBSTANSI INTI/KEGIATAN PRIORITAS	INSTANSI PELAKSANA	SASARAN PELAKSANAAN DI WILAYAH						
		SUMATERA	JAWA BALI	KALIMANTAN	SULAWESI	NUSA TENGGARA	MALUKU	PAPUA
Perawatan : Penetapan dan pembentukan pengelolaan terpadu untuk pengelolaan cagar budaya, revitalisasi museum dan perpustakaan di seluruh Indonesia sebelum 2011 • Pengembangan Pengelolaan Peninggalan Kepurbakalaan.	Kemen budpar		• Meningkatnya kualitas perlindungan, pemeliharaan, pengembangan, dan pe-manfaatan BCB/Situs dan Kawasan kepurbakalaan secara terpadu Kawasan Warisan Budaya Dunia yang dimulai dengan Candi					

SUBSTANSI INTI/KEGIATAN PRIORITAS	INSTANSI PELAKSANA	SASARAN PELAKSANAAN DI WILAYAH						
		SUMATERA	JAWA BALI	KALIMANTAN	SULAWESI	NUSA TENGGARA	MALUKU	PAPUA
			Borobudur, Situs Manusia Purba Sangiran, dan Candi Prambanan, selesai tahun 2011). • Lokasi : Jawa Tengah, dan DI Yogyakarta.					
Perawatan : Penetapan dan pembentukan pengelolaan terpadu untuk pengelolaan cagar budaya, revitalisasi museum dan perpustakaan di seluruh Indonesia sebelum 2011. • Pengembangan Pe-ngelolaan Permuseuman.	Kemen budpar	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya kualitas pengelolaan dan pelayanan museum, termasuk museum daerah. 						
Perawatan : Penetapan dan pembentukan pengelolaan terpadu untuk pengelolaan cagar budaya, revitalisasi museum dan	Perpusnas	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya kegiatan layanan jasa perpustakaan dan informasi yang didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai melalui peningkatan jumlah perpustakaan yang memiliki perangkat <i>e-library</i>. 						

SUBSTANSI INTI/KEGIATAN PRIORITAS	INSTANSI PELAKSANA	SASARAN PELAKSANAAN DI WILAYAH						
		SUMATERA	JAWA BALI	KALIMANTAN	SULAWESI	NUSA TENGGARA	MALUKU	PAPUA
perpustakaan di seluruh Indonesia sebelum 2011. <ul style="list-style-type: none"> Layanan Jasa Perpustakaan dan Informasi. 								
Perawatan : Penetapan dan pembentukan pengelolaan terpadu untuk pengelolaan cagar budaya, revitalisasi museum dan perpustakaan di seluruh Indonesia sebelum 2011. <ul style="list-style-type: none"> Pengembangan Perpustakaan dan Pengkajian Minat Baca. 	Perpusnas							<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya upaya pengembangan perpustakaan dan budaya gemar membaca melalui meningkatnya jumlah perpustakaan keliling dan umum. Lokasi: Kab/Kota dan Desa.
Sarana : Penyediaan sarana yang memadai bagi pengembangan, pendalaman, dan pagelaran seni budaya di kota besar dan ibukota kabupaten selambat-lambatnya Oktober 2012. <ul style="list-style-type: none"> Pelestarian dan Pengembangan 	Kemen budpar							<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya apresiasi , kreativitas dan produktivitas para pelaku seni melalui fasilitasi sarana bagi pengembangan, pendalaman dan pegelaran seni budaya. Lokasi: Kab/Kota

SUBSTANSI INTI/KEGIATAN PRIORITAS	INSTANSI PELAKSANA	SASARAN PELAKSANAAN DI WILAYAH						
		SUMATERA	JAWA BALI	KALIMANTAN	SULAWESI	NUSA TENGGARA	MALUKU	PAPUA
Kesenian.								
<p>Sarana : Penyediaan sarana yang memadai bagi pengembangan, pendalaman, dan pagelaran seni budaya di kota besar dan ibukota kabupaten selambat-lambatnya Oktober 2012.</p> <ul style="list-style-type: none"> Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Nilai Budaya, Seni dan Film. 	Kemen budpar		<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya dalam rangka pengembangan nilai budaya, seni dan perfilman melalui fasilitasi sarana pengembangan, pendalaman, dan pertunjukan seni budaya. 					

SUBSTANSI INTI/KEGIATAN PRIORITAS	INSTANSI PELAKSANA	SASARAN PELAKSANAAN DI WILAYAH						
		SUMATERA	JAWA BALI	KALIMANTAN	SULAWESI	NUSA TENGGARA	MALUKU	PAPUA
			<ul style="list-style-type: none"> Lokasi : Pusat (Jakarta). 					
<p>Penciptaan : Pengembangan kapasitas nasional untuk pelaksanaan Penelitian, Penciptaan dan Inovasi dan memudahkan akses dan penggunaan oleh masyarakat luas.</p> <ul style="list-style-type: none"> Penelitian dan Pengembangan Bidang Arkeologi (Bd). 	Kemen budpar	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya penelitian dan pengembangan bidang arkeologi. Lokasi : Balai Arkeologi Medan, Balai Arkeologi Palembang. 	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya penelitian dan pengembangan bidang arkeologi. Lokasi : Balai Arkeologi Bandung, Balai Arkeologi Yogyakarta, Balai Arkeologi Denpasar. 	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya penelitian dan pengembangan bidang arkeologi. Lokasi : Balai Arkeologi Banjarmasin. 	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya penelitian dan pengembangan bidang arkeologi. Lokasi : Balai Arkeologi Makasar, Balai Arkeologi Manado. 		<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya penelitian dan pengembangan bidang arkeologi. Lokasi : Balai Arkeologi Ambon. 	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya penelitian dan pengembangan bidang arkeologi. Lokasi : Balai Arkeologi Jayapura.
<p>Penciptaan : Pengembangan kapasitas nasional untuk pelaksanaan Penelitian, Penciptaan dan Inovasi dan memudahkan akses dan penggunaan oleh masyarakat luas.</p> <ul style="list-style-type: none"> Penelitian dan Pengembangan 	Kemen budpar		<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya litbang kebudayaan dalam mendukung kebijakan pembangunan kebudayaan. 					

SUBSTANSI INTI/KEGIATAN PRIORITAS	INSTANSI PELAKSANA	SASARAN PELAKSANAAN DI WILAYAH						
		SUMATERA	JAWA BALI	KALIMANTAN	SULAWESI	NUSA TENGGARA	MALUKU	PAPUA
Bidang Kebudayaan (Bd).			<ul style="list-style-type: none"> Lokasi : Pusat (Jakarta). 					
<p>Kebijakan : Peningkatan perhatian dan kesertaan pemerintah dalam program-program seni budaya yang diinisiasi oleh masyarakat dan mendorong berkembangnya apresiasi terhadap kemajemukan budaya.</p> <ul style="list-style-type: none"> Pelestarian dan Pengembangan Kesenian. 	Kemen budpar		<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya apresiasi, kreativitas, dan produktivitas para pelaku seni. Lokasi : Pusat (Jakarta). 					
<p>Kebijakan : Peningkatan perhatian dan kesertaan pemerintah dalam program-program seni budaya yang diinisiasi oleh masyarakat dan mendorong berkembangnya apresiasi terhadap kemajemukan budaya.</p> <ul style="list-style-type: none"> Pengembangan Perfilman 	Kemen budpar		<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya kualitas dan kuantitas produksi film nasional. Lokasi : Pusat 					

SUBSTANSI INTI/KEGIATAN PRIORITAS	INSTANSI PELAKSANA	SASARAN PELAKSANAAN DI WILAYAH						
		SUMATERA	JAWA BALI	KALIMANTAN	SULAWESI	NUSA TENGGARA	MALUKU	PAPUA
Nasional.			(Jakarta).					
<p>Kebijakan : Peningkatan perhatian dan kesertaan pemerintah dalam program-program seni budaya yang diinisiasi oleh masyarakat dan mendorong berkembangnya apresiasi terhadap kemajemukan budaya.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan Sensor Film. 	Kemen budpar		<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan lembaga sensor film. • Lokasi : Pusat (Jakarta). 					
<p>Inovasi Teknologi : Peningkatan keunggulan komparatif menjadi keunggulan kompetitif yang mencakup pengelolaan sumber daya maritim menuju ketahanan energi, pangan, danantisipasi perubahan iklim.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penelitian dan Pengembangan IPTEK Kelautan. 		<ul style="list-style-type: none"> • Rekomendasi dan inovasi teknologi perlindungan pantai, energi terbarukan, pengawasan, eksplorasi, eksploitasi, instrumentasi kelautan, maritim, mitigasi/ adaptasi bencana dan perubahan iklim yang meningkatkan 	<ul style="list-style-type: none"> • Rekomendasi dan inovasi teknologi perlindungan pantai, energi terbarukan, pengawasan, eksplorasi, eksploitasi, instrumentasi kelautan, maritim, mitigasi/ adaptasi bencana dan perubahan iklim yang meningkatkan 	<ul style="list-style-type: none"> • Rekomendasi dan inovasi teknologi perlindungan pantai, energi terbarukan, pengawasan, eksplorasi, eksploitasi, instrumentasi kelautan, maritim, mitigasi/ adaptasi bencana dan perubahan iklim yang meningkatkan efisiensi pengelolaan sumber daya 	<ul style="list-style-type: none"> • Rekomendasi dan inovasi teknologi perlindungan pantai, energi terbarukan, pengawasan, eksplorasi, eksploitasi, instrumentasi kelautan, maritim, mitigasi/ adaptasi bencana dan 	<ul style="list-style-type: none"> • Rekomendasi dan inovasi teknologi perlindungan pantai, energi terbarukan, pengawasan, eksplorasi, eksploitasi, instrumentasi kelautan, maritim, mitigasi/ adaptasi bencana dan 	<ul style="list-style-type: none"> • Rekomendasi dan inovasi teknologi perlindungan pantai, energi terbarukan, pengawasan, eksplorasi, eksploitasi, instrumentasi kelautan, maritim, mitigasi/ adaptasi bencana dan 	<ul style="list-style-type: none"> • Rekomendasi dan inovasi teknologi perlindungan pantai, energi terbarukan, pengawasan, eksplorasi, eksploitasi, instrumentasi kelautan, maritim, mitigasi/ adaptasi bencana dan

SUBSTANSI INTI/KEGIATAN PRIORITYAS	INSTANSI PELAKSANA	SASARAN PELAKSANAAN DI WILAYAH						
		SUMATERA	JAWA BALI	KALIMANTAN	SULAWESI	NUSA TENGGARA	MALUKU	PAPUA
		efisiensi pengelolaan sumber daya kelautan.	efisiensi pengelolaan sumber daya kelautan. • Lokasi : DKI Jakarta, Jawa Barat.	kelautan. • Lokasi : Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan.	perubahan iklim yang meningkatkan efisiensi pengelolaan sumber daya kelautan. • Lokasi: Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara.	kelautan. • Lokasi : NTB, NTT.	perubahan iklim yang meningkatkan efisiensi pengelolaan sumber daya kelautan.	pengelolaan sumber daya kelautan.

**MATRIKS SINKRONISASI PUSAT DAN DAERAH DALAM PENCAPAIAN PRIORITAS NASIONAL
PRIORITAS LAINNYA: BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN, PEREKONOMIAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**

SUBSTANSI INTI/KEGIATAN PRIORITAS	INSTANSI PELAKSANA	SASARAN PELAKSANAAN DI WILAYAH						
		SUMATERA	JAWA BALI	KALIMANTAN	SULAWESI	NUSA TENGGARA	MALUKU	PAPUA
Politik, Hukum dan Keamanan • Pemberdayaan Industri Strategis Bidang Pertahanan.	Kementerian Pertahanan/TNI							<ul style="list-style-type: none"> • Pemberdayaan Industri Strategis Pertahanan Dalam Negeri. <ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan Prototype Alutsista Dalam Negeri. <ul style="list-style-type: none"> • Produksi Alutsista Integratif Dalam Negeri. • Produksi Alutsista Matra Darat Dalam Negeri. • Produksi Alutsista Matra Laut Dalam Negeri. • Produksi Alutsista Matra Udara Dalam Negeri. • Membentuk lembaga <i>clearing house</i> untuk pengelolaan industri pertahanan. • Pembentukan Peraturan Presiden tentang Revitalisasi Industri Pertahanan.
Politik, Hukum dan Keamanan • Pemberdayaan Industri Strategis	KRT							<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya dukungan teknologi bagi pemberdayaan industri strategis bidang pertahanan.

SUBSTANSI INTI/KEGIATAN PRIORITAS	INSTANSI PELAKSANA	SASARAN PELAKSANAAN DI WILAYAH						
		SUMATERA	JAWA BALI	KALIMANTAN	SULAWESI	NUSA TENGGARA	MALUKU	PAPUA
Bidang Pertahanan.								
Politik, Hukum dan Keamanan • Pemberdayaan Industri Strategis Bidang Pertahanan.	BPPT	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya Pengkajian dan Penerapan Teknologi Industri Pertahanan dan Keamanan BPPT (Pesawat Udara Nir Awak / PUNA). 						
Politik, Hukum dan Keamanan • Penguatan dan Pemantapan Hubungan Kelembagaan Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.	Seluruh K/L dan Pemda	<ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan dan kelembagaan dalam rangka pencegahan korupsi. • Transparansi administrasi publik, efektivitas kewajiban pelaporan kepada publik, dan meningkatkan akses publik terhadap informasi. <ul style="list-style-type: none"> • Penyempurnaan peraturan perundang-undangan terkait reformasi sistem perencanaan dan penganggaran pembangunan. <ul style="list-style-type: none"> • Penyempurnaan sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah. <ul style="list-style-type: none"> • Memperkuat mekanisme pengawasan. • Fasilitas sistem pelaporan keuangan negara yang transparan dan akuntabel. • Reformasi kelembagaan, bisnis proses dan peningkatan manajemen SDM. • Konsolidasi dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan untuk melaksanakan strategi pemberantasan korupsi serta kormonev pemberantasan korupsi. <ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan mekanisme kampanye terpadu pencegahan korupsi dan dan proses pembelajaran anti korupsi. <ul style="list-style-type: none"> • Memperkuat badan anti korupsi dalam rangka pemberantasan korupsi. • Penyusunan ketentuan yang terkait dengan pelaksanaan etika pemerintahan dan integritas pejabat sektor publik. • Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi (RAD-PK) Provinsi dan Kabupaten/Kota sampai dengan tahun 2014. 						
Politik, Hukum dan Keamanan	Mahkamah Agung	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan penanganan kasus korupsi, pemberantasan mafia hukum dan mafia kasus. 						

SUBSTANSI INTI/KEGIATAN PRIORITAS	INSTANSI PELAKSANA	SASARAN PELAKSANAAN DI WILAYAH						
		SUMATERA	JAWA BALI	KALIMANTAN	SULAWESI	NUSA TENGGARA	MALUKU	PAPUA
<ul style="list-style-type: none"> • Penindakan dan Penanganan Korupsi. 	Kejaksaan Agung Kepolisian Komisi Pemberantasan Korupsi	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan upaya pengembalian aset hasil korupsi (<i>asset recovery</i>). • Pembenhahan mekanisme perlindungan saksi dan pelapor tindak pidana korupsi. • Penyusunan peraturan perundang-undangan dalam rangka implementasi strategi nasional pemberantasan korupsi 2010-2025. 						
Politik, Hukum dan Keamanan : Kebijakan Penguatan dan Perlindungan HAM <ul style="list-style-type: none"> • Penguatan Perlindungan HAM. 	Kementerian Hukum dan HAM Mahkamah Agung Komnas HAM	<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan peraturan perundang-undangan yang berperspektif HAM. • Penyusunan kebijakan terkait penghormatan, pemajuan, dan penegakan HAM. <ul style="list-style-type: none"> • Pemantapan pelaksanaan RAN-HAM di pusat dan daerah. • Perbaiki kebijakan dan mekanisme bantuan hukum kepada masyarakat, khususnya masyarakat miskin dan terpinggirkan. • Pengembangan mekanisme mediasi, penyelesaian alternatif dan pengembangan sistem pemulihan korban kasus HAM. 						
Politik, Hukum dan Keamanan : Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM <ul style="list-style-type: none"> • Penguatan Perlindungan HAM. 	Komnas HAM Kejaksaan Agung Mahkamah Agung	<ul style="list-style-type: none"> • Pemantapan hasil investigasi berbagai kasus pelanggaran HAM yang belum terselesaikan. • Jumlah perkara pelanggaran HAM yang disidik dan diserahkan kepada Pengadilan HAM. • Terelesaikannya berbagai kasus pelanggaran HAM sampai dengan tahun 2014. 						
Perekonomian <ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan Industri 	Kementerian Perindustrian	<ul style="list-style-type: none"> • Terwujudnya pelaksanaan pengembangan industri sesuai dengan Peraturan Presiden NO. 28/2008 tentang Kebijakan Industri Nasional 						
Perekonomian <ul style="list-style-type: none"> • Diplomasi Perdagangan Internasional. 	Kementerian Perdagangan	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya peran dan kemampuan Republik Indonesia dalam diplomasi perdagangan internasional. 						

SUBSTANSI INTI/KEGIATAN PRIORITAS	INSTANSI PELAKSANA	SASARAN PELAKSANAAN DI WILAYAH						
		SUMATERA	JAWA BALI	KALIMANTAN	SULAWESI	NUSA TENGGARA	MALUKU	PAPUA
Perekonomian • Pelayanan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI).	Kementerian Nakertrans	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya pelayanan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) selama proses penyiapan, pemberangkatan dan kepulangan. 						
Perekonomian • Pelayanan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI).	Kementerian Nakertrans	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya upaya pelayanan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri. 						
Kesejahteraan Rakyat • Pelaksanaan ibadah haji.	Kementerian Agama	<ul style="list-style-type: none"> Tewujudnya pelaksanaan ibadah haji yang tertib dan lancar paling lambat pada tahun 2010 (nasional). 						
Kesejahteraan Rakyat • Peningkatan kerukunan beragama.	Kementerian Agama	<ul style="list-style-type: none"> Terwujudnya peningkatan kerukunan umat beragama melalui pembentukan dan peningkatan efektivitas Forum Umat Beragama (FKUB) (nasional). 						
Kesejahteraan Rakyat : Perumusan kebijakan dan pedoman bagi penerapan pengarusutamaan (<i>mainstreaming</i>) Gender (PUG) oleh Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian Lainnya, termasuk perlindungan bagi perempuan dan anak terhadap	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya jumlah kebijakan pelaksanaan PUG di bidang sosial, politik, dan hukum. <ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya jumlah kebijakan pelaksanaan PUG di bidang ekonomi. Meningkatnya jumlah kebijakan perlindungan perempuan terhadap berbagai tindak kekerasan. 						

SUBSTANSI INTI/KEGIATAN PRIORITAS	INSTANSI PELAKSANA	SASARAN PELAKSANAAN DI WILAYAH						
		SUMATERA	JAWA BALI	KALIMANTAN	SULAWESI	NUSA TENGGARA	MALUKU	PAPUA
berbagai tindak kekerasan <ul style="list-style-type: none"> • Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan. 								
Kesejahteraan Rakyat : Perumusan kebijakan dan pedoman bagi penerapan pengarusutamaan (<i>mainstreaming</i>) Gender (PUG) oleh Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian Lainnya, termasuk perlindungan bagi perempuan dan anak terhadap berbagai tindak kekerasan. <ul style="list-style-type: none"> • Perlindungan Anak. 	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak							<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya jumlah kebijakan penghapusan kekerasan pada anak.
Kesejahteraan Rakyat Peningkatan jumlah wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara sebesar 20 persen secara bertahap dalam 5 tahun	Kemenbudpar							<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya jumlah wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara sebesar 20 persen secara bertahap selama 5 (lima) tahun (nasional).

SUBSTANSI INTI/KEGIATAN PRIORITAS	INSTANSI PELAKSANA	SASARAN PELAKSANAAN DI WILAYAH						
		SUMATERA	JAWA BALI	KALIMANTAN	SULAWESI	NUSA TENGGARA	MALUKU	PAPUA
<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan pariwisata. 								
<p>Kesejahteraan Rakyat</p> <p>Promosi 10 tujuan pariwisata Indonesia melalui saluran pemasaran dan pengiklanan yang kreatif dan efektif</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan pariwisata. 	Kemenbudpar							<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya jumlah wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara sebesar 20 persen secara bertahap selama 5 (lima) tahun (nasional).
<p>Kesejahteraan Rakyat</p> <p>Perbaikan dan peningkatan kualitas jaringan prasarana dan sarana pendukung pariwisata</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan pariwisata. 	Kemenbudpar							<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya jumlah wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara sebesar 20 persen secara bertahap selama 5 (lima) tahun (nasional).
<p>Kesejahteraan Rakyat</p> <p>Peningkatan kapasitas pemerintah dan pemangku kepentingan pariwisata lokal untuk mencapai tingkat mutu pelayanan dan <i>hospitality management</i> yang <i>competitive</i> di kawasan Asia</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan pariwisata. 	Kemenbudpar							<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya jumlah wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara sebesar 20 persen secara bertahap selama 5 (lima) tahun (nasional).

SUBSTANSI INTI/KEGIATAN PRIORITAS	INSTANSI PELAKSANA	SASARAN PELAKSANAAN DI WILAYAH						
		SUMATERA	JAWA BALI	KALIMANTAN	SULAWESI	NUSA TENGGARA	MALUKU	PAPUA
<p>Kesejahteraan Rakyat</p> <p>Pencapaian posisi papan atas pada South East Asia (SEA) Games pada tahun 2011</p> <ul style="list-style-type: none"> Program Pembinaan Olahraga Prestasi. 	Kemenpora	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya budaya dan prestasi olahraga yang ditandai oleh tercapainya posisi papan atas pada <i>South East Asia (SEA) Games</i> pada tahun 2011 (nasional). 						
<p>Kesejahteraan Rakyat</p> <p>Peningkatan perolehan medali di Asian Games Tahun 2010 dan Olimpiade tahun 2012</p> <ul style="list-style-type: none"> Program Pembinaan Olahraga Prestasi. 	Kemenpora	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya budaya dan prestasi olahraga, yang ditandai oleh meningkatnya perolehan medali di Asian Games tahun 2010 dan Olimpiade tahun 2012 (nasional). 						

SUBSTANSI INTI/KEGIATAN PRIORITAS	INSTANSI PELAKSANA	SASARAN PELAKSANAAN DI WILAYAH						
		SUMATERA	JAWA BALI	KALIMANTAN	SULAWESI	NUSA TENGGARA	MALUKU	PAPUA
Kesejahteraan Rakyat Peningkatan <i>Character Building</i> melalui gerakan, revitalisasi, dan konsolidasi gerakan kepemudaan • Program Pelayanan Kepemudaan.	Kemenpora	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya partisipasi dan peran aktif pemuda di berbagai bidang pembangunan yang ditandai antara lain dengan meningkatnya <i>character building</i>, revitalisasi dan konsolidasi gerakan kepemudaan (nasional). 						
Kesejahteraan Rakyat Revitalisasi Gerakan Pramuka • Program Pelayanan Kepemudaan.	Kemenpora	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya partisipasi dan peran aktif pemuda di berbagai bidang pembangunan, yang ditandai dengan terlaksananya revitalisasi gerakan pramuka (nasional). 						



BAB II

PENGEMBANGAN WILAYAH SUMATERA TAHUN 2010—2014

2.1 Kondisi Wilayah Sumatera Saat Ini

2.1.1 Capaian Pembangunan Wilayah

Pertumbuhan ekonomi tiap provinsi di wilayah Sumatera dalam kurun waktu 2004—2008 memiliki rata-rata angka pertumbuhan yang positif, kecuali Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) yang negatif (**Tabel 2.1**). Pada tahun 2008, di wilayah Sumatera pertumbuhan ekonomi tertinggi diberikan oleh Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jambi, Bengkulu, Lampung, dan Kepulauan Riau. Secara umum, pertumbuhan ekonomi di wilayah Sumatera cenderung meningkat, tetapi menurun pada tahun 2008. Krisis global menyebabkan permintaan negara maju terhadap beberapa komoditas ekspor dari wilayah ini berkurang.

TABEL 2.1
PERTUMBUHAN EKONOMI WILAYAH SUMATERA TAHUN 2004 - 2008
ATAS DASAR HARGA KONSTAN TAHUN 2000 (DALAM PERSEN)

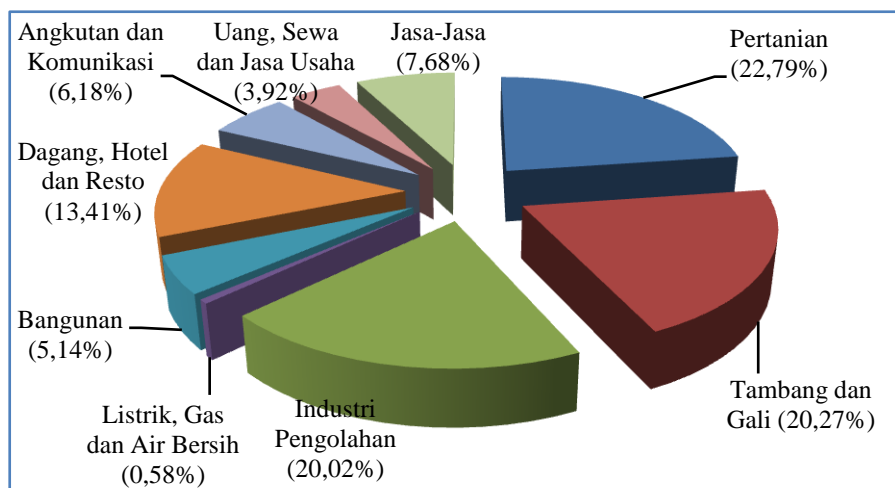
Provinsi	2004	2005	2006	2007	2008
NAD	-9,6	-10,1	1,6	-2,2	-8,3
Sumatera Utara	5,7	5,5	6,2	6,9	6,4
Sumatera Barat	5,5	5,7	6,1	6,3	6,4
Riau	2,9	5,4	5,2	3,4	5,5
Jambi	5,4	5,6	5,9	6,8	7,2
Sumatera Selatan	4,6	4,8	5,2	5,8	5,1
Bengkulu	5,4	5,8	6,0	6,0	4,9
Lampung	5,1	4,0	5,0	5,9	5,3
Kep Bangka Belitung	3,3	3,5	4,0	4,5	4,4
Kep. Riau	6,5	6,6	6,8	7,0	6,6

Sumber : Badan Pusat Statistik

Dari sisi kontribusi sektoral di wilayah Sumatera triwulan 1 tahun 2008 (**Gambar 2.1**), tiga penyumbang terbesar perekonomian di wilayah Sumatera adalah sektor pertanian, pertambangan dan penggalian, serta industri pengolahan. Sektor

pertanian, industri pengolahan, perdagangan, hotel, dan restoran juga merupakan penyerap tenaga kerja utama di hampir semua provinsi di wilayah Sumatera. Di samping itu, sektor tersebut juga cukup besar dalam memberikan kontribusi bagi pertumbuhan wilayah Sumatera karena wilayah Sumatera memiliki kekayaan sumber daya alam perkebunan, perikanan, serta pertambangan yang kemudian mendorong berkembangnya berbagai industri pengolahan di sektor tersebut. Namun, masih belum tercukupinya sarana dan prasarana dalam menunjang kegiatan ekonomi, yaitu sarana dan prasarana transportasi serta sarana dan prasarana industri di wilayah Sumatera yang cukup luas, tetap menjadi kendala dalam mengoptimalkan sektor unggulan di wilayah Sumatera.

GAMBAR 2.1
KONTRIBUSI EKONOMI WILAYAH SUMATERA MENURUT SEKTOR
ATAS DASAR HARGA BERLAKU TRIWULAN I TAHUN 2008

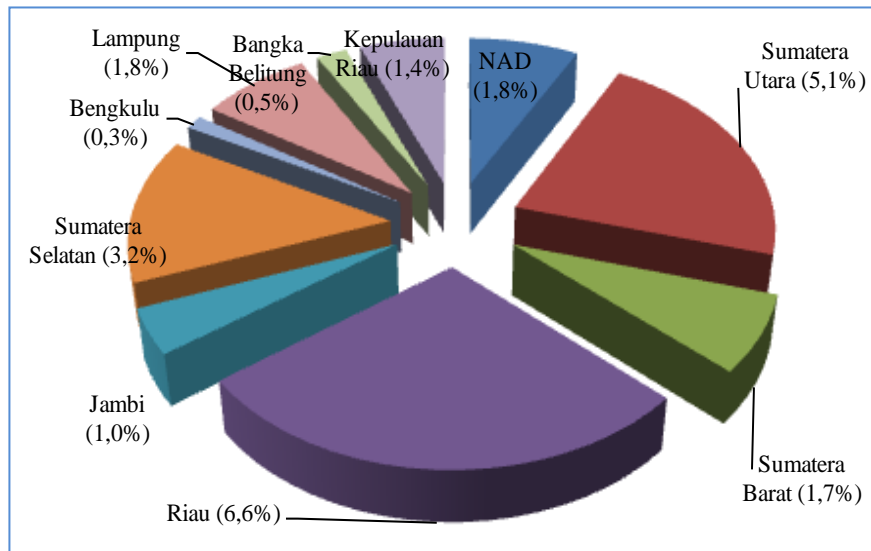


Sumber : Badan Pusat Statistik (diolah)

Secara keseluruhan, kontribusi perekonomian wilayah Sumatera terhadap perekonomian nasional pada tahun 2008 adalah sekitar 23 persen. Kontribusi perekonomian wilayah Sumatera terhadap perekonomian nasional merupakan kontribusi terbesar kedua setelah wilayah Jawa-Bali. Sementara itu, kontribusi perekonomian provinsi terhadap perekonomian wilayah nasional sebagian berasal dari perekonomian di Provinsi Riau, Sumatera Utara, dan Sumatera Selatan. Sementara itu provinsi yang memiliki kontribusi terendah terhadap perekonomian nasional adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Bengkulu. Meskipun masih memiliki kontribusi pertumbuhan ekonomi nasional yang rendah, beberapa provinsi di wilayah Sumatera memiliki potensi yang cukup tinggi dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan mempertimbangkan karakteristik lokasi wilayah dan sumber daya

alam yang dimiliki (**Gambar 2.2**).

GAMBAR 2.2
KONTRIBUSI EKONOMI WILAYAH SUMATERA TERHADAP EKONOMI NASIONAL
ATAS DASAR HARGA BERLAKU TAHUN 2008



Sumber : Badan Pusat Statistik (diolah)

Sektor unggulan wilayah Sumatera, antara lain, adalah industri kelapa sawit, industri karet dan barang dari karet yang berada di Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Selatan dan Bengkulu; industri pulp dan kertas di Provinsi Riau; industri dasar besi dan baja dan industri logam dasar bukan besi di Provinsi Sumatera Utara dan Kepulauan Bangka Belitung. Komoditas kelapa sawit dan karet dari wilayah ini berperan strategis bagi perekonomian nasional sebagai salah satu komoditas ekspor andalan di pasar global. Namun, terdapat kecenderungan yang perlu segera dipecahkan, yakni terus menurunnya perkembangan Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di wilayah Sumatera dari tahun 2004 hingga tahun 2008. Secara keseluruhan, pada tahun 2008 investasi PMDN di wilayah Sumatera hanya sekitar 23,77 persen dari total PMDN secara nasional dan PMA sekitar 6,79 persen dari total PMA secara nasional. Zona tengah dan utara wilayah Sumatera masih menjadi motor penggerak utama dalam menarik investasi. Provinsi Riau dan Kepulauan Riau merupakan daerah yang paling banyak menarik investasi, baik PMA maupun PMDN.

Dalam kurun lima tahun terakhir, secara umum Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita wilayah Sumatera terus meningkat. Namun, jika dibandingkan dengan antarprovinsi, terlihat adanya ketimpangan yang cukup tinggi. Ketimpangan

yang cukup tinggi adalah antara pendapatan per kapita Provinsi Riau dan Kepulauan Riau dengan daerah-daerah lainnya di wilayah Sumatera. Provinsi Riau dan Kepulauan Riau memiliki PDRB per kapita tertinggi. Sedangkan Provinsi Bengkulu merupakan provinsi dengan PDRB per kapita terendah. Sebagai gambaran, besar PDRB per kapita Provinsi Kepulauan Riau adalah sekitar enam kali PDRB per kapita Bengkulu (**Tabel 2.2**).

TABEL 2.2
PDRB PER KAPITA DENGAN MIGAS WILAYAH SUMATERA
TAHUN 2004—2008 ATAS DASAR HARGA KONSTAN TAHUN 2000
(DALAM RIBU RUPIAH)

Provinsi	2004	2005	2006	2007	2008
NAD	9.874	8.886	8.873	8.519	7.938
Sumatera Utara	6.873	7.078	7.393	7.775	8.141
Sumatera Barat	6.081	6.385	6.681	7.006	7.350
Riau	16.642	16.396	16.832	17.001	17.553
Jambi	4.553	4.762	4.956	5.206	5.486
Sumatera Selatan	7.143	7.282	7.548	7.872	8.155
Bengkulu	3.806	3.984	4.154	4.335	4.479
Lampung	4.001	4.148	4.293	4.485	4.656
Kep.Babel	8.219	8.101	8.300	8.552	8.806
Kep. Riau	23.916	23.756	24.304	24.922	25.478

Sumber : Badan Pusat Statistik

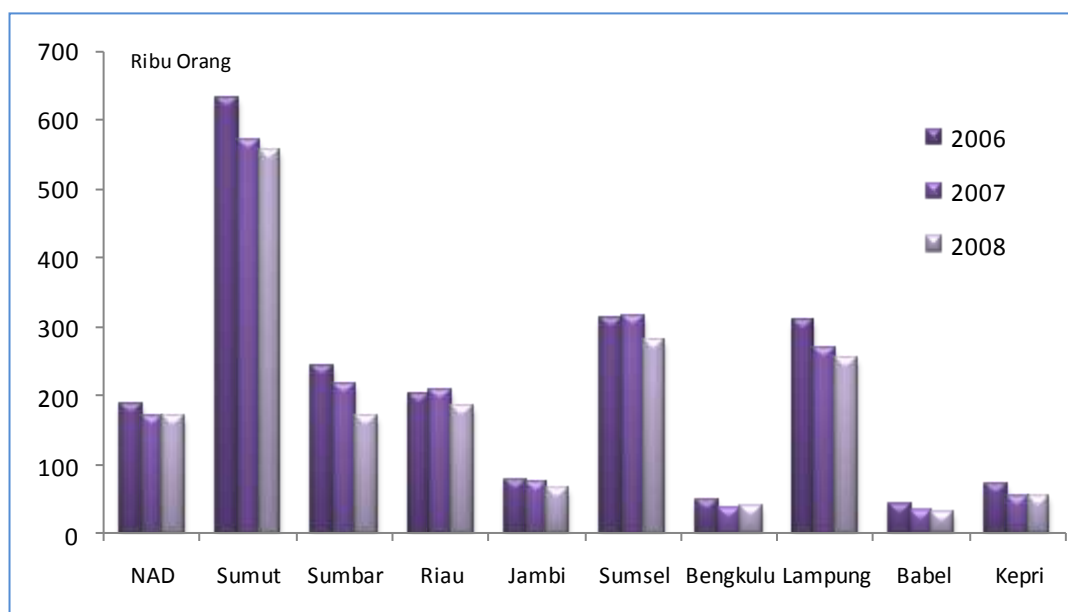
Jumlah angkatan kerja di wilayah Sumatera dalam kurun waktu lima tahun (2004—2008) cenderung meningkat setiap tahun dengan rata-rata peningkatan 1,92 persen atau bertambah sebanyak rata-rata 403.492 jiwa per tahun. Peningkatan jumlah angkatan kerja terbesar selama kurun waktu 2004—2008 terjadi pada tahun 2008, yaitu sebesar 4,48 persen atau 987.113 jiwa dari tahun 2007. Jika dibandingkan dengan antarprovinsi pada tahun 2008, jumlah angkatan kerja paling banyak terdapat di Provinsi Sumatera Utara, yaitu sebesar 5.930.892 jiwa atau 26,44 persen dari seluruh angkatan kerja di wilayah Sumatera dan terendah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yaitu sebesar 501.386 jiwa atau sebesar 2,24 persen.

Tingkat pengangguran terbuka di wilayah Sumatera dalam kurun waktu 2006—2008 cenderung menurun setiap tahun. Jumlah penganggur tertinggi adalah pada tahun 2008 di Provinsi Sumatera Utara, yaitu sebanyak 566.478 jiwa atau 30,45 persen dari total penganggur di wilayah Sumatera, sedangkan jumlah penganggur terendah terdapat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebanyak 29.017 jiwa atau sebesar 1,56 persen

dari total penganggur wilayah Sumatera (**Gambar 2.3**).

Walaupun dilihat dari PDRB per kapita daerah-daerah di zona utara dan tengah lebih tinggi jika dibandingkan dengan di zona selatan, tetapi jika dilihat dari tingkat pengangguran ternyata daerah-daerah di zona utara dan tengah lebih tinggi jika dibandingkan dengan daerah zona selatan. Meskipun memiliki pendapatan perkapita yang cukup besar jika dibandingkan provinsi lainnya, Provinsi Sumatera Utara memiliki jumlah penganggur yang tinggi. Kondisi ini perlu mendapatkan perhatian serius karena daerah-daerah yang menjadi pusat pertumbuhan dan kegiatan ekonomi justru memperlihatkan tingkat pengangguran yang jauh lebih besar jika dibandingkan dengan daerah yang bukan pusat pertumbuhan ekonomi.

GAMBAR 2.3
JUMLAH PENGANGGURAN WILAYAH SUMATERA TAHUN 2006—2008



Sumber : Badan Pusat Statistik (diolah)

Secara umum, perkembangan jumlah dan persentase penduduk miskin setiap provinsi selama kurun waktu 2004—2009 menunjukkan kecenderungan menurun. Berdasarkan persentase penduduk miskin, persentase kemiskinan tertinggi pada tahun 2009 yang masih berada pada tingkat kemiskinan dua digit, yaitu di Provinsi NAD sebesar 21,8 persen, Lampung sebesar 20,2 persen, Bengkulu sebesar 18,6 persen, Sumatera Selatan sebesar 16,3 persen, dan Sumatera Utara sebesar 11,5 persen (**Tabel 2.3**).

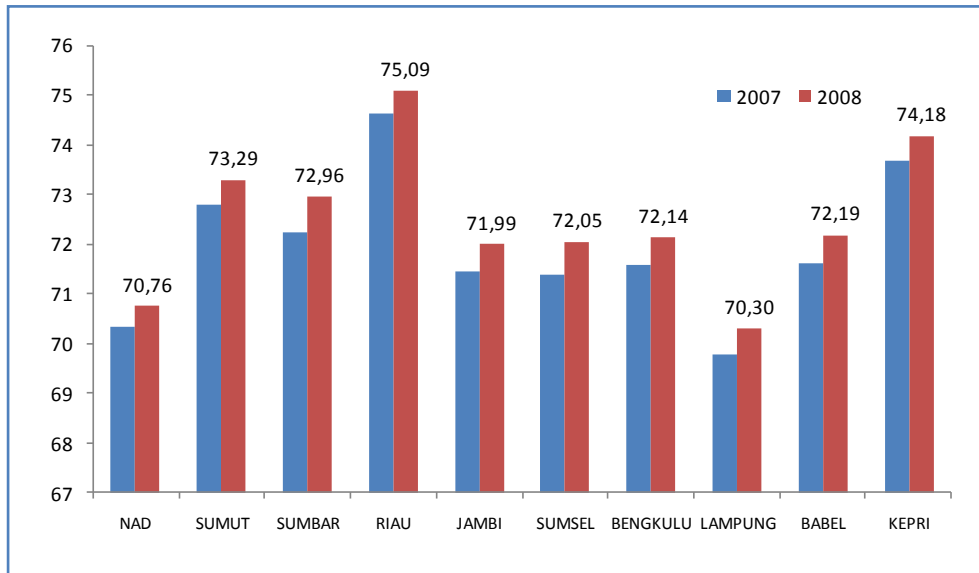
TABEL 2.3
PERSENTASE KEMISKINAN WILAYAH SUMATERA TAHUN 2007—2009

Provinsi	2007	2008	2009
NAD	26,7	23,5	21,8
Sumatera Utara	13,9	12,6	11,5
Sumatera Barat	11,9	10,7	9,5
Riau	11,2	10,6	9,5
Jambi	10,3	9,3	8,8
Sumatera Selatan	19,2	17,7	16,3
Bengkulu	22,1	20,6	18,6
Lampung	22,2	21,0	20,2
Kep. Bangka Belitung	9,5	8,6	7,5
Kep. Riau	10,3	9,2	8,3

Sumber : Badan Pusat Statistik

Indeks pembangunan manusia (IPM) atau *Human Development Index (HDI)*, sebagai ukuran kualitas hidup manusia wilayah Sumatera memperlihatkan adanya peningkatan di beberapa provinsi dalam kurun waktu 2007—2008. IPM tahun 2008 di wilayah Sumatera berkisar antara 70,30 (terendah) di Provinsi Lampung dan 75,09 (tertinggi) di Riau (**Gambar 2.4**).

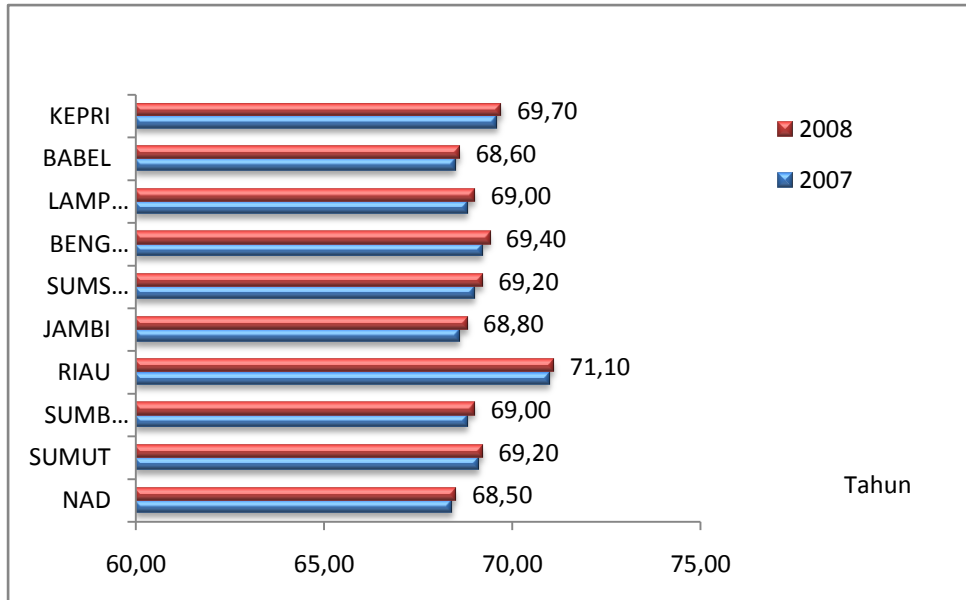
GAMBAR 2.4
INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA WILAYAH SUMATERA
TAHUN 2007—2008



Sumber : Badan Pusat Statistik (diolah)

Terkait dengan bidang kesehatan, Umur Harapan Hidup (UHH) per provinsi di wilayah Sumatera menunjukkan adanya kesenjangan antarprovinsi. Umur harapan hidup tertinggi terdapat di Provinsi Riau, sedangkan umur harapan hidup terendah terdapat di NAD. Indikator umur harapan hidup di wilayah Sumatera meningkat secara merata sebesar 0.1–0.2 selama tahun 2007 hingga tahun 2008. Perkembangan Umur Harapan Hidup (UHH) antarprovinsi di wilayah Sumatera dapat dilihat pada Gambar 2.5 sebagai berikut.

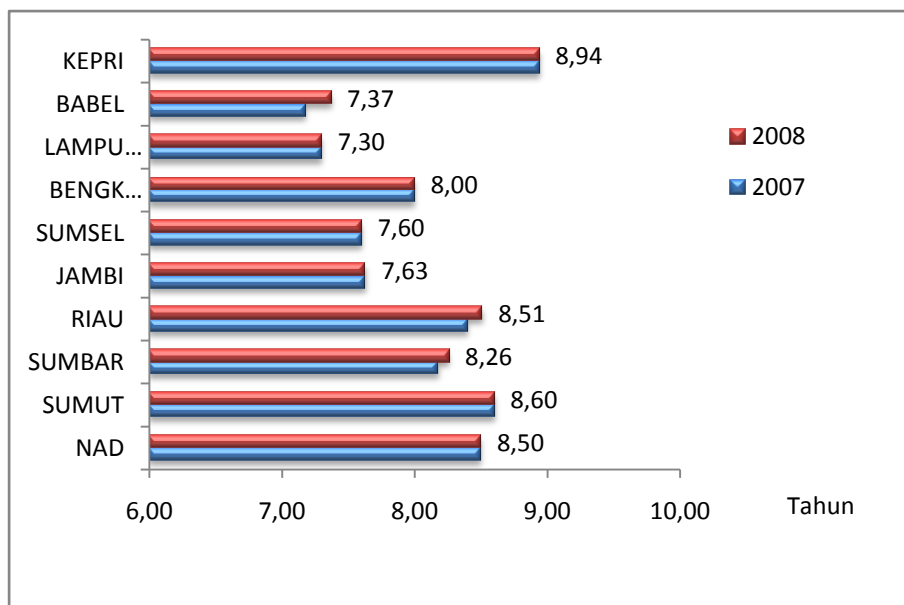
GAMBAR 2.5
UMUR HARAPAN HIDUP WILAYAH SUMATERA TAHUN 2007—2008



Sumber : Badan Pusat Statistik (diolah)

Dalam bidang pendidikan, perkembangan angka rata-rata lama sekolah di beberapa provinsi di wilayah Sumatera pada tahun 2007—2008 tidak menunjukkan perkembangan yang signifikan bahkan relatif tetap di beberapa provinsi. Dukungan infrastruktur pendidikan dan tenaga pengajar masih menjadi kendala bagi meningkatnya angka rata-rata lama sekolah di wilayah Sumatera. Selain itu, kondisi wilayah Sumatera yang kerap dilanda bencana sering mengakibatkan infrastruktur pendidikan rusak sehingga dapat menghambat berlangsungnya proses belajar mengajar. Di wilayah Sumatera, angka rata-rata lama sekolah tertinggi berada di Provinsi Kepulauan Riau dan terendah di Lampung (**Gambar 2.6**).

GAMBAR 2.6
RATA-RATA LAMA SEKOLAH WILAYAH SUMATERA TAHUN 2007—2008



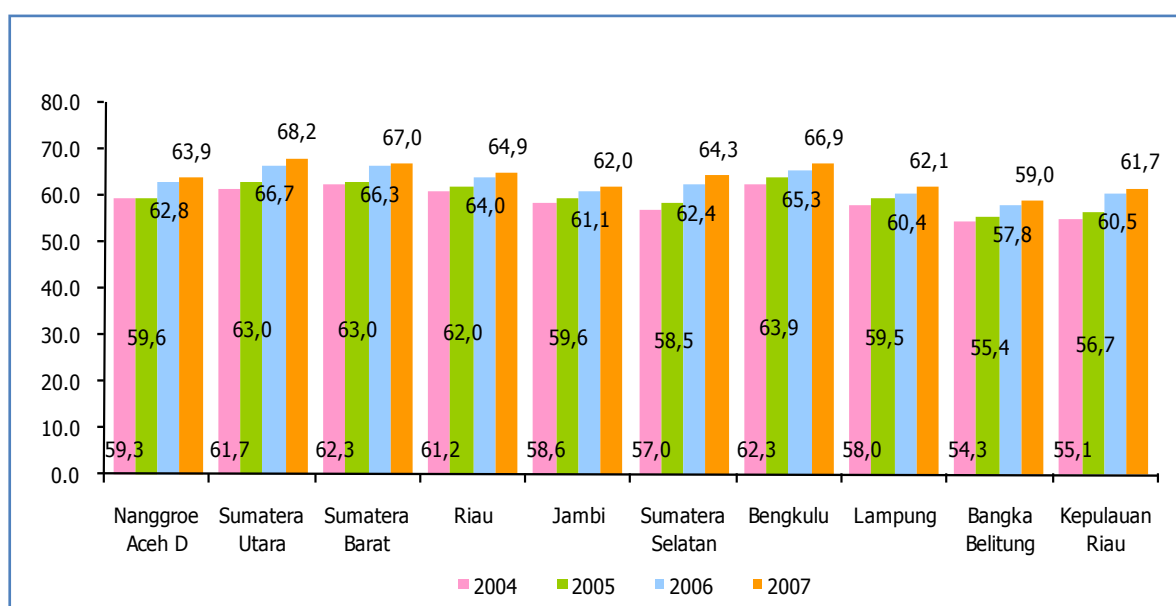
Sumber : Badan Pusat Statistik (diolah)

Keberhasilan dalam penanganan kinerja ekonomi, sumber daya manusia, dan kemiskinan tidak terlepas dari fasilitas pelayanan publik dan infrastruktur. Kelancaran kegiatan usaha perlu didukung oleh ketersediaan fasilitas atau infrastruktur fisik, seperti jalan raya, kereta api, pelabuhan laut dan udara, sarana komunikasi, dan sumber energi atau penerangan. Aksesibilitas antardaerah di wilayah Sumatera dapat dilalui melalui jalan darat yang dikategorikan ke dalam tiga kelas jalan, yakni jalan nasional, jalan provinsi, dan jalan kabupaten/kota. Jalan nasional sudah beraspal 78,52 persen dan sisanya belum beraspal. Sementara untuk jalan provinsi, 65 persen yang beraspal dan jalan kabupaten hanya 46 persen yang beraspal. Secara rata-rata, hampir 90 persen desa-desa di wilayah Sumatera dapat diakses melalui jalan darat, 2,3 persen bisa diakses melalui transportasi air, dan 8,3 persen lainnya bisa dilalui melalui transportasi air dan darat. Untuk Provinsi Kepulauan Riau, hanya 66,5 persen dapat dicapai dengan perjalanan darat, sedangkan sekitar 8 persen wilayah hanya bisa dicapai dengan perjalanan air (sungai dan laut), dan sisanya, 25 persen, memiliki akses perjalanan darat dan air. Hal ini disebabkan oleh Provinsi Kepulauan Riau merupakan wilayah kepulauan yang terdiri atas ribuan pulau-pulau kecil.

Demikian juga dengan Indeks Pembangunan Gender (IPG) (*Gender-Related Development Index/GDI*) Indonesia, dihitung berdasarkan variabel yang sama dengan IPM menurut jenis kelamin. Di wilayah Sumatera, IPG setiap provinsi meningkat pada tahun 2007. Peringkat tertinggi adalah Provinsi Sumatera Utara sebesar 68,2; diikuti

oleh Sumatera Barat sebesar 67,0; dan Bengkulu sebesar 66,9. Walaupun demikian, nilai IPG di enam provinsi lain masih di bawah rata-rata nasional, yakni sebesar 65,8. Nilai terendah berada di Provinsi Bangka Belitung, yakni sebesar 59,0 yang disebabkan oleh rendahnya persentase kontribusi dalam pendapatan dan Umur Harapan Hidup (UHH) perempuan. Hal ini menunjukkan masih terjadinya kesenjangan gender antarprovinsi di wilayah Sumatera (**Gambar 2.7**).

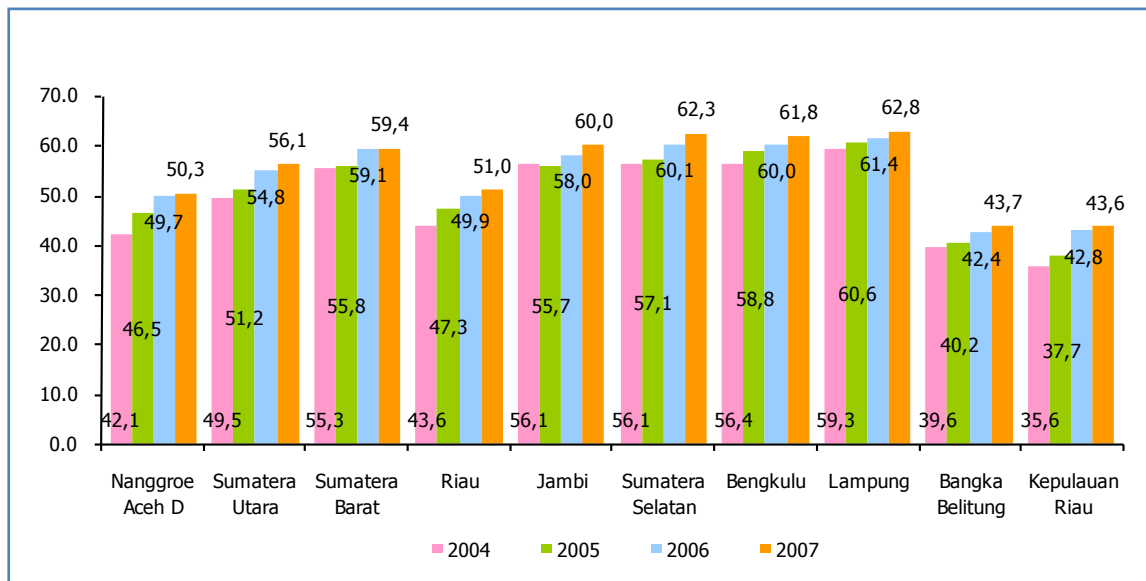
GAMBAR 2.7
PERKEMBANGAN INDEKS PEMBANGUNAN GENDER WILAYAH SUMATERA TAHUN 2004—2007



Sumber: BPS dan Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan (diolah)

Selain indikator IPG, pembangunan gender juga ditunjukkan dengan indikator *Gender Empowerment Measurement* (GEM) atau Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) yang diukur melalui partisipasi perempuan dalam bidang ekonomi, politik, dan pengambilan keputusan. Di wilayah Sumatera, IDG tahun 2007 untuk tiap-tiap provinsi juga meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2006, dengan rata-rata nasional sebesar 62,1. Lampung berada di peringkat tertinggi dengan nilai 62,8, sedangkan Kepulauan Riau berada di peringkat terendah dengan nilai 43,6 (**Gambar 2.8**). Rendahnya nilai tersebut disebabkan oleh rendahnya keterwakilan perempuan di parlemen, proporsi perempuan dalam pekerjaan profesional, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), dan upah nonpertanian perempuan. Di samping itu, upaya perlindungan perempuan dan anak, terutama terhadap berbagai tindak kekerasan, juga perlu ditingkatkan karena hal tersebut merupakan salah satu prioritas lain dalam bidang kesejahteraan rakyat.

GAMBAR 2.8
PERKEMBANGAN INDEKS PEMBERDAYAAN GENDER
WILAYAH SUMATERA TAHUN 2004—2007



Sumber: BPS dan Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan (diolah)

Kinerja pelayanan infrastruktur untuk sektor energi dapat diidentifikasi melalui ketersediaan dan produksi bahan bakar minyak (BBM). Wilayah Sumatera memiliki empat buah kilang minyak dengan kapasitas produksi 301 MBSD. Berdasarkan data yang ada, sarana penerangan (aliran listrik) belum menjangkau seluruh permukiman di wilayah Sumatera. Dari seluruh penerangan yang ada, PLN tetap menjadi penyedia utama energi listrik yang mampu melayani lebih dari 60 persen wilayah Sumatera. Pada tahun 2004—2006, setiap provinsi masih memiliki kisaran 10—20 persen penerangan memakai sumber nonlistrik. Untuk mencukupi kebutuhan penerangan listrik, perlu dilakukan pengembangan teknologi sumber energi karena setiap provinsi di wilayah Sumatera, memiliki potensi kekayaan sumber daya alam energi.

Kualitas lingkungan wilayah Sumatera terus menurun. Hal itu ditunjukkan dengan meningkatnya pencemaran air, daerah aliran sungai (DAS) dan lahan yang telah menyebabkan menurunnya fungsi daya dukung lingkungan terhadap kehidupan manusia. Kualitas lahan yang semakin memburuk, antara lain, disebabkan oleh degradasi hutan di kawasan lindung bekas tambang yang tidak direklamasi kembali. Beberapa daerah yang sudah memiliki rencana tata ruang wilayah (RTRW) ternyata belum mengacu pada Peraturan Perundang-undangan dalam bidang penataan ruang. Selain itu terdapat ketidaksesuaian RTRW antartingkatan pemerintahan, atau

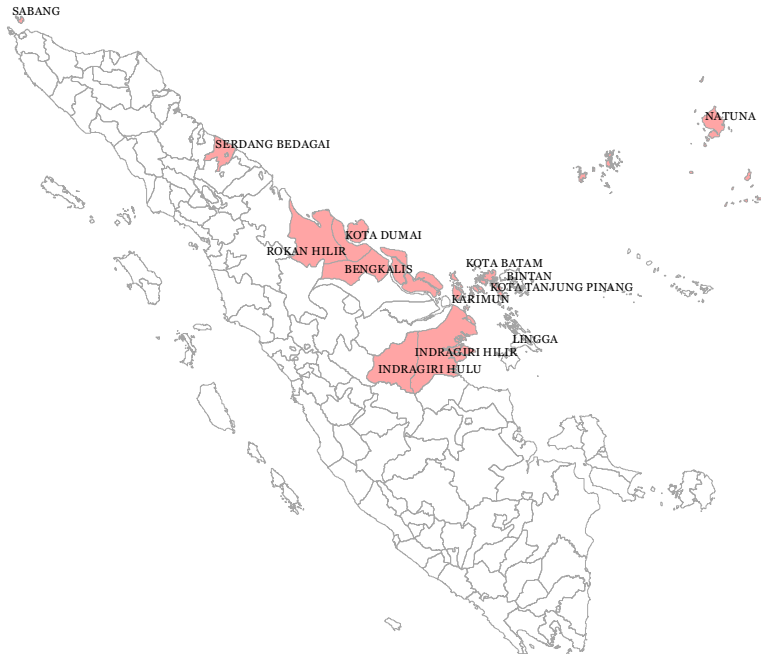
antardaerah, serta terdapat ketidakjelasan peran dan kewenangan lembaga koordinasi penataan ruang di tingkat lokal.

Tingginya tingkat deforestasi akibat *illegal logging*, ladang berpindah, dan perambahan hutan mencapai 5,1 persen di tahun 2007 untuk seluruh kawasan (Provinsi Jambi sebanyak 20,82 persen, Bengkulu sebanyak 46,5 persen, Riau sebanyak 15,03 persen). Alih fungsi hutan yang sangat cepat terjadi pada kurun 2002—2007 yaitu mencapai 19,1 persen. Luas lahan kritis di wilayah Sumatera mencapai 25.898.972 hektar atau sekitar 33,29 persen dari luas lahan kritis di Indonesia. Luas lahan kritis terbesar di Provinsi Riau seluas 7.116.530 hektar dan terkecil di Kepulauan Bangka Belitung seluas 672.214 hektar. Kerusakan hutan tertinggi diakibatkan oleh penebangan liar seluas 1,06 Juta ha atau 4,95 persen dari luas kawasan hutan yang ada. Kerusakan lahan hutan dan pertanian akibat kebakaran hutan dan lahan mengakibatkan polusi yang tinggi hingga ke negara tetangga. Pencemaran/polusi akibat emisi dalam tahun 2004—2006 meningkat rata-rata sebesar 30 persen. Jumlah desa yang mengalami pencemaran air sebanyak 1337 desa, pencemaran tanah sebanyak 247 desa, polusi udara dan bau sebanyak 1185 desa, serta berkurangnya ruang terbuka hijau (RTH) sebanyak 449 desa.

Jika memperhatikan posisi geografis Indonesia yang berada pada pertemuan lempeng bumi serta lintasan gunung api aktif (*ring of fire*), wilayah Sumatera memiliki potensi ancaman bencana alam yang setiap saat dapat mengancam dan mempengaruhi kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Gempa bumi dengan kekuatan 7,6 SR yang mengguncang wilayah Sumatera baru-baru ini adalah fakta yang nyata rentannya terhadap gangguan bencana alam. Bencana alam yang telah terjadi, antara lain, dapat dilihat dari berbagai wilayah pascabencana, seperti di Provinsi Sumatera Barat, NAD, Sumatera Utara, dan Bengkulu. Provinsi Bengkulu merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang rawan terhadap bencana gempa bumi dan tsunami karena terletak di antara dua lempengan Samudra India dengan lempengan Eurasia.

Indonesia yang merupakan negara kepulauan dengan garis pantai sekitar 81.900 kilometer memiliki wilayah perbatasan dengan banyak negara, baik perbatasan darat (kontinen) maupun laut (maritim). Perbatasan di wilayah Sumatera tersebar di Provinsi NAD, Sumatera Utara, Riau dan Kepulauan Riau (Gambar 2.9), sedangkan negara yang berbatasan langsung dengan wilayah Sumatera adalah India, Malaysia, Singapura, dan Thailand. Wilayah perbatasan laut pada umumnya berupa pulau-pulau terdepan, termasuk pulau-pulau kecil. Beberapa di antaranya masih perlu penataan dan pengelolaan yang lebih intensif karena mempunyai kecenderungan permasalahan dengan negara tetangga.

GAMBAR 2.9
DAERAH PERBATASAN DI WILAYAH SUMATERA



Sumber : Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal (diolah)

Konsep rencana pengelolaan perbatasan antarnegara ini diharapkan dapat memberikan prinsip pengembangan wilayah perbatasan antarnegara sesuai dengan karakteristik fungsionalnya untuk mengatasi ketertinggalan dari daerah di sekitarnya yang lebih berkembang ataupun untuk menyinergikan dengan perkembangan negara tetangga. Selain itu, kebijakan dan strategi ke depan nantinya juga ditujukan untuk menjaga atau mengamankan wilayah perbatasan negara dari upaya eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan, baik yang dilakukan oleh masyarakat maupun yang dilakukan dengan dorongan kepentingan negara tetangga sehingga kegiatan ekonomi dapat dilakukan secara lebih selektif dan optimal.

2.1.2. Isu Strategis

Dari uraian fakta, potensi, dan permasalahan di wilayah Sumatera, dapat ditarik beberapa isu strategis di wilayah Sumatera yaitu sebagai berikut.

1. **Optimalisasi pengembangan sektor dan komoditas unggulan wilayah**

Komoditas unggulan wilayah Sumatera yang berperan strategis secara wilayah ataupun nasional di antaranya kelapa sawit, karet, pulp, tanaman pangan dan hortikultura. Namun, nilai tambah komoditas tersebut masih relatif kecil bagi

wilayah penghasilnya karena belum berkembangnya mata rantai industri pengolahan. Bentang alam wilayah Sumatera juga memiliki keindahan alam yang sangat potensial dikembangkan sebagai tujuan wisata nasional. Jika mengingat lokasi geografisnya yang sangat strategis, pengembangan sektor dan komoditas tersebut berpotensi menjadi penggerak utama pertumbuhan wilayah bahkan nasional dalam kerangka perekonomian regional ASEAN yang semakin terintegrasi.

2. Keterbatasan sumber daya energi listrik dalam mendukung pengembangan ekonomi lokal

Kapasitas jaringan pembangkit listrik di wilayah Sumatera sudah sangat mendesak untuk ditingkatkan. Untuk memenuhi kebutuhan saat ini saja, seringkali terjadi pemadaman bergilir pada saat beban puncak. Arah pengembangan wilayah Sumatera sebagai pusat pengembangan industri pengolahan berbasis sumber daya alam mutlak membutuhkan pasokan energi listrik yang andal dengan sistem jaringan yang terintegrasi untuk satu wilayah.

3. Integrasi jaringan transportasi intermoda wilayah

Keragaman potensi sumber daya alam yang dimiliki provinsi-provinsi di wilayah Sumatera berpotensi untuk meningkatkan perdagangan domestik dan menghasilkan sinergi pengembangan industri unggulan wilayah. Untuk itu, dukungan jaringan transportasi wilayah menjadi sangat strategis. Kondisi saat ini menunjukkan belum optimalnya kapasitas jaringan jalan lintas Sumatera serta belum berkembangnya integrasi jaringan transportasi jalan, kereta api, angkutan sungai, laut, dan udara.

4. Kualitas sumber daya manusia dan kemiskinan

Sebagai wilayah dengan peranan terpenting kedua bagi perekonomian nasional setelah Jawa dan Bali, serta mempertimbangkan arah pengembangan ke depan sebagai pusat industri pengolahan di luar Jawa, dukungan kualitas sumber daya manusia yang unggul menjadi sangat strategis. Seiring dengan transformasi struktural perekonomian wilayah, kualitas angkatan kerja yang dituntut tidak lagi sekadar bersaing di tingkat nasional, tetapi di tingkat regional ASEAN bahkan global. Di sisi lain, upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia menghadapi tantangan berat, terkait masih tingginya tingkat kemiskinan di beberapa provinsi: Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Selatan, Bengkulu, dan Lampung. Dengan demikian, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan peningkatan akses pendidikan dan pelayanan kesehatan bagi rumah tangga miskin merupakan isu strategis yang saling melengkapi.

5. Kualitas birokrasi dan tata kelola

Kualitas birokrasi dan tata kelola yang baik berpotensi meningkatkan daya tarik dan daya saing daerah. Melalui penyederhanaan perijinan dan kejelasan regulasi,

investasi di daerah akan berpeluang meningkat. Meningkatnya aktivitas ekonomi akan menyerap tenaga kerja yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kesejahteraan juga dimungkinkan melalui menurunnya biaya yang harus dikeluarkan rumah tangga miskin dalam mengakses pelayanan publik.

6. Pengembangan kawasan perbatasan, pulau-pulau terdepan dan terpencil

Letak geografis wilayah Sumatera yang berada di jalur pelayaran internasional sangat berpotensi menjadi lokasi kegiatan-kegiatan ilegal lintas negara, berupa penyelundupan barang dan manusia, pencurian ikan dan gangguan keamanan lain. Hal ini diperparah dengan masih belum tuntasnya perjanjian perbatasan antarnegara yang berpotensi konflik klaim atas pulau-pulau terdepan. Tantangan utama dalam menjaga keutuhan kedaulatan negara adalah kesenjangan tingkat kesejahteraan dengan wilayah negara tetangga.

7. Kerawanan bencana dan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup

Secara geologis, wilayah Sumatera berada pada pertemuan lempeng bumi dan lintasan gunung api aktif (*ring of fire*). Dinamika lempeng bumi dalam mencari keseimbangan berakibat pada tingginya frekuensi gempa bumi khususnya di sepanjang pesisir barat wilayah Sumatera. Potensi gempa bumi juga diikuti potensi terjadinya bencana tsunami. Kejadian bencana di Provinsi NAD pada akhir tahun 2004 dan di Padang pada tahun 2009 memberi dampak kerusakan yang luas bagi perekonomian wilayah. Di sisi lain, bencana alam juga dapat diakibatkan oleh aktivitas pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan yang melebihi daya dukung lingkungan sebagaimana terlihat pada bencana banjir bandang dan kebakaran hutan.

2.2. Arah Pengembangan Wilayah

Wilayah Sumatera merupakan salah satu pulau terbesar di Indonesia yang berperan penting dalam mendukung peningkatan kinerja pembangunan nasional. Wilayah Sumatera memiliki posisi geografis yang strategis di wilayah barat Indonesia dan berhadapan langsung dengan kawasan Asia Timur yang menjadi salah pusat perekonomian dunia dan memiliki hubungan interaksi paling dekat dengan wilayah Jawa. Wilayah Sumatera berada pada posisi strategis nasional karena dari arah tenggara sampai timur dilintasi oleh ALKI yang memanjang dari Laut Natuna, Selat Karimata, Laut Jawa, dan Selat Sunda. Alur laut ini terbuka bagi pelayaran dari Laut Cina Selatan ke Samudera Hindia dan sebaliknya. Wilayah Sumatera bagian timur dan utara juga terbuka bagi pelayaran menuju kawasan Asia Pasifik, Afrika, dan Eropa. Dengan demikian, wilayah Sumatera berpotensi besar sebagai pusat pertumbuhan di kawasan subregional ASEAN, Asia Pasifik, dan kawasan internasional lainnya. Wilayah Sumatera

memiliki akses perdagangan paling strategis jika dibandingkan dengan pulau besar lain di Indonesia yang juga memiliki kekayaan sumber daya alam yang besar. Berbagai prasarana dan sarana, peluang usaha dan ketersediaan sumber daya manusia di wilayah Sumatera tersedia secara memadai. Wilayah Sumatera diharapkan menjadi wilayah penopang utama dalam menghadapi persaingan global, terutama dengan terbentuknya masyarakat ekonomi ASEAN.

Tantangan yang dihadapi wilayah Sumatera adalah penyesuaian terhadap perubahan yang terjadi pada tataran global dengan tetap mengutamakan nilai-nilai keutamaan lokal, menyangkut perubahan tatanan politik, sosial, ekonomi, teknologi informasi, tetapi juga perubahan cara pandang, nilai, dan gaya hidup. Tantangan ini hanya dapat diatasi dengan terus meningkatkan mutu sumber daya manusia dan mendorong peningkatan kesejahteraan rakyat, antara lain, melalui perbaikan jangkauan dan kualitas layanan publik, penguatan ketahanan budaya, peningkatan kemandirian, pengembangan ekonomi rakyat, dan peningkatan daya saing.

Solusi untuk menjawab tantangan tersebut sangat dipengaruhi oleh berbagai upaya dalam peningkatan kualitas, proses, dan kinerja politik dalam menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak dasar rakyat; pemantapan ketertiban yang menciptakan rasa aman bagi rakyat; penegakan hukum secara adil dan tanpa diskriminasi, serta peningkatan kapasitas dan integritas aparat dalam memberikan layanan kepada rakyat. Tantangan yang tidak kalah pentingnya adalah peningkatan dan perluasan jangkauan sarana dan prasarana yang menghubungkan rakyat di pelosok daerah ke pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan pemerintahan; pengembangan wilayah dan penataan ruang secara cermat, disiplin, dan terpadu dengan memperhatikan tata guna lahan, zonasi, serta pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang menjamin pembangunan berkelanjutan. Rekayasa, pengembangan dan penyebaran teknologi dalam bidang produksi, informasi, dan komunikasi yang sesuai dengan perkembangan zaman juga menjadi tantangan wilayah Sumatera. Oleh sebab itu, pengembangan pengetahuan dan teknologi sebagai basis penguatan daya saing wilayah Sumatera menjadi makin penting dan mendesak.

Dengan memperhatikan rancangan Rencana Tata Ruang Pulau Sumatera, pengembangan wilayah Sumatera diarahkan untuk (1) memantapkan interaksi antarkawasan pesisir timur, kawasan tengah, dan kawasan pesisir barat Sumatera melalui pengembangan sistem jaringan transportasi darat, laut, dan transportasi udara lintas Sumatera yang andal; (2) mendorong berfungsinya pusat-pusat permukiman perkotaan sebagai pusat pelayanan jasa koleksi dan distribusi di Pulau Sumatera; (3) mengembangkan akses bagi daerah terisolasi dan pulau-pulau kecil di pesisir barat dan timur Sumatera sebagai sentra produksi perikanan, pariwisata, minyak dan gas bumi ke pusat kegiatan industri pengolahan serta pusat pemasaran lintas pulau dan lintas negara; (4) mempertahankan kawasan lindung sekurang-kurangnya 40% dari luas Pulau Sumatera dalam rangka mengurangi risiko dampak bencana lingkungan yang dapat mengancam keselamatan masyarakat dan aset sosial-ekonominya yang berbentuk

prasarana, pusat permukiman ataupun kawasan budi daya; (5) mengembangkan komoditas unggulan wilayah yang memiliki daya saing tinggi melalui kerja sama lintas sektor dan lintas wilayah provinsi dalam pengelolaan dan pemasaran dalam mendorong kemandirian akses ke pasar global dengan mengurangi ketergantungan pada negara-negara tetangga; (6) menghindari konflik pemanfaatan ruang pada kawasan perbatasan lintas wilayah meliputi lintas wilayah provinsi, lintas wilayah kabupaten dan kota; (7) mempertahankan dan melestarikan budaya lokal dari pengaruh negatif globalisasi dan liberalisasi perdagangan dunia; (8) memantapkan keterkaitan antara kawasan andalan, kawasan budi daya lain, berikut kota-kota pusat kegiatan di dalamnya dengan kawasan dan pusat pertumbuhan antarpulau di wilayah nasional, serta dengan pusat-pusat pertumbuhan di kawasan subregional ASEAN, Asia Pasifik, dan kawasan internasional lain.

Strategi pemanfaatan ruang wilayah Sumatera diwujudkan dalam rencana tata ruang Pulau Sumatera yang berisi (1) strategi pengembangan struktur ruang; dan (2) strategi pengelolaan pola pemanfaatan ruang. Strategi pengembangan struktur ruang mencakup (1) strategi pengembangan sistem pusat permukiman; dan (2) strategi pengembangan sistem jaringan prasarana wilayah, sedangkan strategi pengelolaan pola pemanfaatan ruang mencakup (1) strategi pengelolaan ruang kawasan lindung; dan (2) strategi pengelolaan ruang kawasan budi daya.

Pengembangan sistem pusat permukiman di wilayah Sumatera ditekankan pada terbentuknya fungsi dan herarki pusat permukiman sesuai rencana tata ruang wilayah nasional yang meliputi Pusat Kegiatan Nasional (PKN), Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), Pusat Kegiatan Lokal (PKL) dan Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) di kawasan perbatasan negara sebagai satu kesatuan sistem yang berherarki.

Pengembangan PKN di wilayah Sumatera diarahkan untuk (1) mendorong pengembangan kota Lhokseumawe, Dumai dan Batam di wilayah timur dan kota Padang di wilayah barat sebagai pusat pelayanan primer; (2) mengendalikan pengembangan kawasan perkotaan Medan-Binjai-Deli Serdang, Bandar Lampung dan sekitarnya, dan Palembang dan sekitarnya, sebagai pusat pelayanan primer yang sesuai dengan daya dukung lingkungannya; dan (3) mendorong pengembangan kota Pekanbaru dan Jambi sebagai pusat pelayanan sekunder.

Pengembangan PKW di wilayah Sumatera diarahkan untuk (1) mendorong pengembangan kota-kota Takengon, NAD, Sidikalang, Tebingtinggi, Pematang Siantar, Balige, Rantau Prapat, Kisaran, Padang Sidempuan, Pariaman, Bagan Siapiapi, Bangkinang, Bengkalis, Tembilahan, Siak Sri Indrapura, Rengat, Tanjung Balai Karimun, Pasir Pangarayan, Tanjung Pinang, Taluk Kuantan, Terempa, Daik Lingga, Dabo/Singkep, Muara Bulian, Sarolangun, Muara Bungo, Kuala Tungkal, Muara Enim, Lahat, Kayuagung, Sekayu, Pangkalpinang, Muntok, Tanjung Pandan, Manggar, Manna, Muko Muko, Baturaja, Prabumulih, Metro, Kalianda, Menggala, Kota Agung, dan Kotabumi; (2) mengendalikan pengembangan kota-kota Sabang, Meulaboh, Langsa, Sibolga, Gunung

Sitoli, Muarasiberut, Sawahlunto, Bukittinggi, Lubuk Linggau, Bengkulu, dan Liwa sebagai pusat pelayanan sekunder sesuai dengan daya dukung lingkungannya.

Pengembangan PKL di wilayah Sumatera ditetapkan melalui peraturan daerah provinsi berdasarkan usulan pemerintah kabupaten/kota dengan kriteria sebagaimana ditetapkan dalam RTRWN. Pengembangan PKS di kawasan perbatasan negara di wilayah Sumatera merupakan upaya untuk mendorong pengembangan Kota Sabang, Medan, Tanjung Balai, Dumai, Batam, Ranai, dan Tanjung Pinang.

2.3 Tujuan dan Sasaran Pengembangan Wilayah

Berdasarkan arahan pengembangan wilayah Sumatera, tujuan pembangunan wilayah Sumatera dalam kurun waktu 2010—2014 adalah untuk:

1. meningkatkan standar hidup masyarakat Sumatera;
2. meningkatkan produksi dan produktivitas sektor pertanian, perkebunan, perikanan, dan pertambangan di wilayah Sumatera;
3. mengembangkan jaringan dan meningkatnya transportasi di wilayah Sumatera;
4. mengembangkan Sumatera bagian Selatan sebagai lumbung pangan dan lumbung energi;
5. mengembangkan Sumatera bagian tengah dan Sumatera bagian utara sebagai pusat perkebunan dan agribisnis;
6. mewujudkan keseimbangan pembangunan wilayah Sumatera bagian utara, bagian selatan, dan pesisir pantai.

Jika mengacu pada tujuan pengembangan wilayah Sumatera, sasaran yang dicapai dalam rangka pengembangan wilayah Sumatera kurun waktu tahun 2010—2014 adalah sebagai berikut.

1. meningkatnya standar hidup masyarakat Sumatera yang ditunjukkan dengan membaiknya berbagai indikator pembangunan, yaitu pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, pengangguran, angka kematian bayi, angka harapan hidup, pengangguran serta pendapatan per kapita;
2. meningkatnya produksi dan produktivitas sektor pertanian, perkebunan, perikanan dan pertambangan di wilayah Sumatera;
3. berkembangnya jaringan dan meningkatnya transportasi di wilayah Sumatera;
4. berkembangnya Sumatera bagian selatan sebagai lumbung pangan dan lumbung energi;
5. berkembangnya Sumatera bagian tengah dan Sumatera bagian utara sebagai pusat perkebunan dan agribisnis;

6. terwujudnya keseimbangan pembangunan wilayah Sumatera bagian utara, bagian selatan, dan pesisir pantai.

TABEL 2.4
SASARAN PERTUMBUHAN EKONOMI, KEMISKINAN DAN PENGANGGURAN
DI WILAYAH SUMATERA TAHUN 2010—2014

Provinsi	Pertumbuhan Ekonomi (%) ¹⁾		Kemiskinan (%) ²⁾		Pengangguran (%) ³⁾	
	2010	2014	2010	2014	2010	2014
NAD	4,5 – 5,0	5,5 – 6,1	19,8 – 21,9	12,5 – 13,8	7,4 – 8,2	5,7 – 6,3
Sumatera Utara	6,4 – 7,1	6,9 – 7,6	10,7 – 11,9	6,8 -7,5	10,3 – 11,4	9,4 - 10,4
Sumatera Barat	4,4 – 4,8	6,0 – 6,5	8,9 – 9,8	5,7 – 6,3	8,4 – 9,3	7,5 – 8,3
Riau	4,6 – 5,0	6,5 – 7,2	8,5 – 9,4	5,2 - 5,8	5,8 – 6,4	5,6 – 6,2
Jambi	4,8 – 5,3	6,9 – 7,6	7,2 – 8,0	4,6 – 5,1	4,2 – 4,7	3,1 – 3,5
Sumatera Selatan	5,5 – 6,0	6,2 – 6,9	14,5 – 16,0	9,2 – 10,2	7,9 -8,7	6,8 – 7,6
Bengkulu	4,5 – 5,5	6,2 – 6,9	18,9 – 20,9	12,0 -13,3	2,6 – 2,9	1,6 – 1,9
Lampung	5,5 – 6,1	6,2 – 6,9	17,6 – 19,4	11,2 – 12,4	5,4 – 6,0	4,7 – 5,2
Bangka Belitung	4,9 – 5,5	6,1 – 6,7	6,6 – 7,3	4,2 – 4,6	3,7 – 4,1	2,4 – 2,7
Kepulauan Riau	7,0 – 7,4	7,5 – 8,2	7,6 - 8,5	4,2 -4,7	3,3 – 3,7	1,5 – 2,4

Sumber: Proyeksi Bappenas; BPS; Susenas

*Keterangan: ¹⁾ *Pertumbuhan Ekonomi: persentase laju perubahan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).*

²⁾ *Kemiskinan: persentase jumlah penduduk miskin terhadap total jumlah penduduk.*

³⁾ *Pengangguran: persentase jumlah pengangguran terbuka terhadap total angkatan kerja.*

TABEL 2.5
SASARAN ANGKA KEMATIAN BAYI, ANGKA HARAPAN HIDUP,
RATA-RATA LAMA SEKOLAH DAN PENDAPATAN PER KAPITA
DI WILAYAH SUMATERA TAHUN 2010—2014

Provinsi	Angka Kematian Bayi ¹⁾		Rata-Rata Lama Sekolah ²⁾		Angka Harapan Hidup ³⁾		Pendapatan Perkapita (Rp.Ribu) ⁴⁾	
	2010	2014	2010	2014	2010	2014	2010	2014
NAD	32	30	8,90	9,30	69,08	69,61	7.972,22	8.882,23
Sumatera Utara	23	20	8,88	9,16	71,64	72,46	8.425,00	9.374,50
Sumatera Barat	27	23	8,25	8,56	70,58	71,70	7.926,09	9.343,21
Riau	22	20	8,44	8,78	71,92	72,57	21.137,34	28.137,51
Jambi	27	24	7,84	8,08	70,43	71,26	5.853,36	6.843,80
Sumatera Selatan	25	23	7,84	8,08	70,97	71,79	8.292,60	8.886,26
Bengkulu	29	25	8,08	8,26	69,97	71,06	4.752,32	5.370,53
Lampung	25	21	7,86	8,42	70,98	72,21	4.809,39	5.277,32
Bangka Belitung	26	24	8,10	9,30	70,72	71,35	8.680,22	8.991,85
Kepulauan Riau	20	19	9,60	10,80	72,38	72,73	26.270,96	28.178,43

Sumber : Proyeksi Bappenas; BPS; Susenas

*Keterangan: ¹⁾ Angka Kematian Bayi: jumlah bayi yang meninggal sebelum mencapai usia 1 tahun per 1000 kelahiran hidup.

²⁾ Rata-rata Lama Sekolah: rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani.

³⁾ Angka Harapan Hidup: perkiraan lama hidup rata-rata penduduk.

⁴⁾ Pendapatan per kapita: pendapatan regional dibagi dengan jumlah penduduk pada pertengahan tahun.

2.4 Arah Kebijakan dan Strategi Pengembangan

Berdasarkan tujuan, sasaran dan mempertimbangkan isu strategis wilayah Sumatera, arah kebijakan dan strategi pengembangan wilayah Sumatera dalam kurun waktu 2010—2014 adalah sebagai berikut:

1. Pengembangan Sumatera sebagai sentra produksi pertanian dan perkebunan dilaksanakan dengan strategi meningkatkan produktivitas sektor pertanian dan perkebunan, khususnya tanaman pangan, hortikultura, sawit, dan karet;

2. Pengembangan sentra produksi perikanan dan hasil laut dilakukan dengan strategi meningkatkan produktivitas usaha perikanan dan rumput laut;
3. Pengembangan gugus (cluster) industri unggulan dilakukan dengan strategi mengembangkan PKN Medan, Batam, Pekanbaru, dan Palembang sebagai pusat industri pengolahan yang melayani kawasan sentra produksi;
4. Pengembangan Sumatera sebagai sentra industri migas dan lumbung energi nasional dilakukan dengan strategi:
 - a. mengoptimalkan produksi minyak, gas, dan batubara;
 - b. mengembangkan sumber energi alternatif.
5. Pengembangan industri pariwisata alam dan budaya dilakukan dengan strategi mengembangkan pusat-pusat tujuan wisata dalam suatu jalur wisata terpadu;
6. Pengembangan sistem jaringan listrik terintegrasi dengan strategi:
 - a. meningkatkan kapasitas pembangkit listrik;
 - b. mengembangkan integrasi sistem jaringan listrik;
 - c. diversifikasi sumber energi pembangkit listrik.
7. Penguatan keterkaitan domestik wilayah Sumatera dilakukan dengan strategi:
 - a. meningkatkan integrasi jaringan transportasi darat lintas Sumatera: Lintas Barat-Lintas Tengah-Lintas Timur;
 - b. meningkatkan kapasitas pelabuhan laut;
 - c. meningkatkan kapasitas pelabuhan udara;
 - d. mengembangkan sistem jaringan transportasi sungai.
8. Pengembangan Sumatera sebagai *pool* angkatan kerja berkualitas dan berdaya saing regional ASEAN dilakukan dengan strategi:
 - a. meningkatkan akses pendidikan dasar, menengah, dan tinggi;
 - b. memperluas jangkauan pelayanan kesehatan khususnya kepada rumah tangga miskin;
 - c. meningkatkan akses pelatihan keterampilan kerja.
9. Peningkatan program penanggulangan kemiskinan dengan strategi meningkatkan efektivitas program penanggulangan kemiskinan dalam menjangkau rumah tangga miskin.
10. Reformasi birokrasi dan tata kelola dilakukan dengan strategi:
 - a. meningkatkan kualitas legislasi;

- b. meningkatkan penegakan hukum, HAM, dan pemberantasan korupsi;
 - c. meningkatkan kualitas pelayanan publik yang terukur dan akuntabel.
11. Pengembangan kawasan perbatasan sebagai beranda depan wilayah nasional dilakukan dengan strategi:
- a. meningkatkan stabilitas keamanan dan ketertiban kawasan perbatasan;
 - b. mengembangkan kegiatan ekonomi lokal kawasan perbatasan.
12. Pembangunan wilayah Sumatera yang sesuai dengan daya dukung lingkungan dilakukan dengan strategi:
- a. meningkatkan mitigasi bencana alam;
 - b. meningkatkan pengelolaan sumber daya alam (SDA) dan lingkungan hidup.

MATRIK BUKU III RPJMN 2010-2014 WILAYAH SUMATERA
ISU STRATEGIS, ARAH KEBIJAKAN, WILAYAH, STRATEGI PENGEMBANGAN DAN FOKUS PRIORITAS

ISU STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN	WILAYAH	STRATEGI PENGEMBANGAN	FOKUS PRIORITAS / KEGIATAN PRIORITAS
<p>Optimalisasi pengembangan sektor dan komoditas unggulan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rendahnya nilai tambah komoditas unggulan • Rendahnya peran sektor pariwisata dalam perekonomian wilayah 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan Sumatera sebagai sentra produksi pertanian dan perkebunan 	<ul style="list-style-type: none"> • Sumatera Utara • Riau • Sumatera Barat • Jambi • Bengkulu • Sumatera Selatan • Lampung 	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan produktivitas sektor pertanian dan perkebunan: <ol style="list-style-type: none"> i. Tanaman pangan ii. Hortikultura iii. Sawit iv. Karet v. Pulp 	<p>Prioritas Nasional</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengadaan sarana transportasi perdesaan. • Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya seperti Peningkatan/rehabilitasi jaringan irigasi dan O & P Jaringan Irigasi. • Peningkatan kapasitas jalan lintas nasional dan jalan strategis nasional. • Preservasi jalan nasional lintas Sumatera. • Pembangunan Jalan Lintas Sumatera. • Pembangunan dan pengelolaan prasaranan dan fasilitas pendukung kereta api. • Perbaiki sistem dan jaringan transportasi sesuai dengan Cetak Biru Transportasi Perkotaan. • Pengelolaan dan pembangunan kegiatan di bidang pelabuhan dan pengerukan di Palembang. • Pembangunan dan peningkatan kapasitas pelabuhan utama, pengumpul, dan pengumpan di Lhokseumawe, Belawan, Teluk Bayur, Dumai, Pekan Baru, Palembang, Panjang, Batam, Tanjung Pinang. • Pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan di bidang lalu lintas dan angkutan laut. • Pembangunan kapal perintis dan subsidi perintis. • Pengelolaan Fasilitas Ekspor dan Impor dengan Pelabuhan/bandara internasional. • Pengembangan dan penetapan sistem logistik nasional yang menjamin kelancaran arus barang dan mengurangi biaya transaksi/ekonomi biaya tinggi.

ISU STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN	WILAYAH	STRATEGI PENGEMBANGAN	FOKUS PRIORITAS / KEGIATAN PRIORITAS
				<p>Prioritas Pulau</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan akses terhadap modal dan informasi pasar produk pertanian. • Penetapan kawasan untuk pengembangan industri pengolahan. • Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana pertanian yang berkualitas. • Peningkatan kualitas sumberdaya manusia. • Peningkatan teknologi produksi kelapa sawit. • Peningkatan Produksi Ketersediaan CPO bahan pangan dari produksi dalam negeri. • Peningkatan kerjasama antra-region dan inter-region dalam pengelolaan dan pemasaran komoditi unggulan kelapa sawit. • Peningkatan kerjasama ekonomi Sub-Regional Indonesia – Malaysia - Thailand (KESR IMT-GT) dan Asia Pasifik. • Dukungan lembaga legislatif terhadap strategi rencana pengembangan industri pengolahan sektor unggulan. • Pencegahan dan penanggulangan gangguan keamanan dan pelanggaran hukum.
	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan sentra produksi perikanan dan hasil laut 	<ul style="list-style-type: none"> • NAD • Kepulauan Riau • Bangka Belitung 	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan produktivitas usaha perikanan dan kelautan: <ol style="list-style-type: none"> i. Perikanan ii. Rumput laut 	<p>Prioritas Nasional</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sarana dan prasarana kawasan budidaya. • Pemenuhan kebutuhan benih untuk produksi dan pasar (patin, nila, lele, gurame, mas, rumput laut). • Pengawalan dan penerapan teknologi terapan adaptif perikanan budidaya berupa penelitian dan pengembangan IPTEK perikanan tangkap. • Pengelolaan Sumberdaya Ikan. <p>Prioritas Pulau</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan budidaya perikanan tambak di pesisir pantai Kab Sigli dan Kab Aceh

ISU STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN	WILAYAH	STRATEGI PENGEMBANGAN	FOKUS PRIORITAS / KEGIATAN PRIORITAS
				<p>Besar.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Konservasi hutan bakau/mangrove di sepanjang perairan Banda Aceh-Pidie dan Sabang. • Pengembangan fasilitas <i>cold storage</i> di Lhok Nga dan Sabang. • Pengembangan budidaya perikanan tambak di pesisir pantai Kab. Aceh Utara dan Kota Lhokseumawe. • Penyediaan sarana dan prasarana transportasi laut. • Peningkatan aksesibilitas sentra-sentra produksi dengan pemasaran produksi perikanan laut.
	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan klaster industri unggulan 	<ul style="list-style-type: none"> • Sumatera Utara • Kepulauan Riau • Riau • Sumatera Selatan 	<ul style="list-style-type: none"> • Mengembangkan PKN Medan, Batam, Pekanbaru, dan Palembang sebagai pusat industri pengolahan yang melayani kawasan sentra produksi 	<p>Prioritas Nasional</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan Sistem angkutan perkotaan di Medan termasuk pembangunan (<i>Intelligent Traffic System</i>). • Pembangunan jalan akses Bandara Kuala Namu dan jalan akses Pelabuhan Belawan. • Perbaikan sistem dan jaringan transportasi sesuai dengan Cetak Biru Transportasi Perkotaan. • Peningkatan dan rehab jalan KA di Sumatera Utara dan di Sumatera Selatan dan jalur ganda di Sumatera Selatan. • Pembangunan Jalur Kereta Api dari Stasiun Araskabu ke Bandara Kualanamu. • Pembangunan Jalur Kereta Api Tanjung Enim-Kota Padang-Pulau Baai. • Pembangunan rusunawa di Kota Medan, Batam, Pekanbaru, dan Palembang. • Pembangunan rusunawa di Kota Bandar Lampung Penyediaan fasilitas pendukung rusunawa di Kota Bandar Lampung. • Penyediaan fasilitas pendukung rusunawa di Kota Jambi. <p>Prioritas Pulau</p>

ISU STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN	WILAYAH	STRATEGI PENGEMBANGAN	FOKUS PRIORITAS / KEGIATAN PRIORITAS
				<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan industri pengolahan kelapa sawit, karet, kakao dan industri pengolahan ikan. • Pengembangan pelabuhan Lhokseumawe sebagai satu kesatuan sistem yang didukung oleh peningkatan kualitas serta kapasitas jaringan jalan menuju tujuan pemasaran di Medan dan Banda Aceh. • Peningkatan kualitas pelayanan pemerintahan yang mendukung terjaganya minat investasi. • Peningkatan kualitas pelayanan jasa keuangan dan pemerintahan yang mendukung kegiatan ekspor-impor. • Peningkatan kapasitas dan kualitas pelayanan pemerintahan, prasarana dan sarana kota (jalan, persampahan, air bersih, air limbah, drainase, dan telekomunikasi) yang memenuhi standar Internasional.
	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan Sumatera sebagai sentra industri migas dan lumbung energi 	<ul style="list-style-type: none"> • NAD • Sumatera Barat • Riau • Kepulauan Riau • Sumatera Selatan 	<ul style="list-style-type: none"> • Mengoptimalkan produksi minyak bumi, gas dan batubara 	<p>Prioritas Pulau</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan kawasan pertambangan di Pekanbaru. • Eksploitasi sumberdaya mineral, minyak dan gas di Natuna. • Peningkatan pengelolaan tambang batu bara di Muara Enim dan sekitarnya. • Pengelolaan pertambangan minyak bumi di Palembang. • Pelaksanaan Survei Umum Produksi Minyak Bumi di Wilayah Terbuka. • Penyediaan sarana dan prasarana teknologi pertambangan. • Pembangunan Jaringan Gas Kota Lhokseumawe, Pekan Baru, Prabumulih, Muara Enim, Jambi dan Lampung.
			<ul style="list-style-type: none"> • Mengembangkan sumber energi 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan biodisel berbahan dasar sawit.

ISU STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN	WILAYAH	STRATEGI PENGEMBANGAN	FOKUS PRIORITAS / KEGIATAN PRIORITAS
			alternatif	<ul style="list-style-type: none"> • Perluasan program konversi minyak tanah ke gas. • Penggunaan gas alam sebagai bahan bakar angkutan umum perkotaan. • Peningkatan Energi Alternatif dengan pengembangan Coal Bed Methane di Sumatera Selatan. • Pembangunan SPBG (gas untuk transportasi).
	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan industri pariwisata alam dan budaya 	<ul style="list-style-type: none"> • Sumatera Utara • Sumatera Barat • Kepulauan Riau • Bangka Belitung 	<ul style="list-style-type: none"> • Mengembangkan pusat-pusat tujuan wisata dalam satu jalur wisata terpadu 	<p>Prioritas Nasional</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perbaikan sistem dan jaringan transportasi sesuai dengan Cetak Biru Transportasi Perkotaan. • Pengembangan Pengelolaan Peninggalan Kepurbakalaan. • Pengembangan Pengelolaan Permuseuman. • Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Nilai Budaya, Seni dan Film. • Penelitian dan Pengembangan Bidang Kebudayaan. • Pelestarian dan Pengembangan Kesenian. <p>Prioritas Pulau</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan Agrowisata perkebunan tembakau di Mebidangro. • Pengembangan dan rehabilitasi Istana Maimun sebagai lokasi pariwisata di kota Medan. • Peningkatan kualitas dan kuantitas fasilitas pendukung kegiatan pariwisata di Agam Bukit Tinggi, Bangka, dan Belitung. • Peningkatan kawasan wisata pengungsi Vietnam di Pulau Galang. • Pengembangan Resort wisata di Lagoi (Bintan).
Keterbatasan sumber daya energi listrik dalam	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan sistem jaringan listrik terintegrasi 	<ul style="list-style-type: none"> • NAD 	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan kapasitas pembangkit tenaga listrik 	<p>Prioritas Nasional</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan Kapasitas Pembangkit, Jaringan dan Gardu Transmisi Listrik di NAD,

ISU STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN	WILAYAH	STRATEGI PENGEMBANGAN	FOKUS PRIORITAS / KEGIATAN PRIORITAS
mendukung pengembangan ekonomi lokal: <ul style="list-style-type: none"> • Belum terpenuhinya permintaan energi listrik wilayah yang terus tumbuh 	Sumatera	<ul style="list-style-type: none"> • Sumatera Utara • Riau • Sumatera Selatan 		Riau dan Bangka Belitung. <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan Kapasitas Pembangkit Jaringan dan Gardu Distribusi. • Pembangunan LPG miniplant Musi Banyuasin (Sumsel) (1 miniplant). Prioritas Pulau <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kegiatan perekonomian masyarakat dan dunia usaha. • Pengembangan energi alternatif untuk disalurkan kepada masyarakat. • Peningkatan teknologi tepat guna untuk memenuhi kebutuhan listrik. • Penyediaan infrastruktur kelistrikan agar terjadi peningkatan daya pasokan listrik. • Peningkatan akses penduduk terhadap listrik. • Merubah pola hidup masyarakat dari boros listrik menjadi hemat listrik (pemakaian sesuai kebutuhan). • Pembentukan kelembagaan kerjasama antara wilayah.
			<ul style="list-style-type: none"> • Mengembangkan integrasi sistem jaringan listrik 	Prioritas Pulau <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan nilai investasi untuk pengembangan interkoneksi energi listrik. • Peningkatan kerjasama antardaerah (provinsi) dalam pengembangan energi listrik di Wilayah Sumateara.
			<ul style="list-style-type: none"> • Diversifikasi sumber energi pembangkit listrik 	Prioritas Pulau <ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan tenaga listrik surya dengan daya kecil untuk penerangan, melalui pembuatan Modul tenaga listrik surya daya tertentu.
Integrasi jaringan transportasi intermoda: <ul style="list-style-type: none"> • Rendahnya kualitas prasarana jalan lintas Sumatera 	<ul style="list-style-type: none"> • Penguatan keterkaitan domestik wilayah Sumatera 	<ul style="list-style-type: none"> • NAD • Sumut • Sumbar • Riau • Jambi 	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan integrasi jaringan transportasi darat Lintas Barat-Lintas Tengah-Lintas Timur 	Prioritas Nasional <ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan dan penetapan sistem logistik nasional yang menjamin kelancaran arus barang dan mengurangi biaya transaksi/ekonomi biaya tinggi. • Pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan di bidang lalu lintas dan angkutan laut. • Preservasi jalan nasional lintas Sumatera, Peningkatan kapasitas jalan nasional lintas

ISU STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN	WILAYAH	STRATEGI PENGEMBANGAN	FOKUS PRIORITAS / KEGIATAN PRIORITAS
<ul style="list-style-type: none"> • Lemahnya integrasi jaringan transportasi wilayah • Terbatasnya pelayanan transportasi laut perintis yang menghubungkan pulau-pulau terdepan 		<ul style="list-style-type: none"> • Sumsel • Bengkulu • Lampung • Kepulauan Riau • Babel 		<p>dan jalan strategis nasional.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan jalan tol Medan-Kuala Namu, Jalan Akses Bandara Kuala Namu. • Pembangunan dan pengelolaan prasarana dan fasilitas pendukung kereta api. • Perbaikan sistem dan jaringan transportasi sesuai dengan Cetak Biru Transportasi Perkotaan. • Pembangunan jalan lintas Sumatera. • Pengembangan Sistem angkutan perkotaan di Medan termasuk pembangunan (<i>Intelligent Traffic System</i>). • Pembangunan jalan akses Bandara Kuala Namu dan jalan akses Pelabuhan Belawan. • Perbaikan sistem dan jaringan transportasi sesuai dengan Cetak Biru Transportasi Perkotaan. • Peningkatan dan rehab jalan KA di Sumatera Utara. • Pembangunan Jalur Kereta Api dari Stasiun Araskabu ke Bandara Kualanamu. <p>Prioritas Pulau</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan akses terhadap modal dan informasi pasar produk pertanian. • Penetapan kawasan untuk pengembangan industri pengolahan. • Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana pertanian yang berkualitas. • Peningkatan kualitas sumberdaya manusia. • Peningkatan teknologi produksi kelapa sawit. • Peningkatan Produksi Ketersediaan CPO bahan pangan dari produksi dalam negeri. • Peningkatan kerjasama antra-region dan inter-region dalam pengelolaan dan pemasaran komoditi unggulan Kelapa Sawit. • Peningkatan kerjasama ekonomi Sub-Regional Indonesia – Malaysia - Thailand (KESR IMT-GT) dan Asia Pasifik.

ISU STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN	WILAYAH	STRATEGI PENGEMBANGAN	FOKUS PRIORITAS / KEGIATAN PRIORITAS
				<ul style="list-style-type: none"> • Dukungan lembaga legislatif terhadap strategi rencana pengembangan industri pengolahan sektor unggulan. • Pencegahan dan penanggulangan gangguan keamanan dan pelanggaran hukum.
		<ul style="list-style-type: none"> • NAD • Sumut • Sumbar • Riau • Bengkulu • Lampung • Babel • Kepulauan Riau 	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan kapasitas pelabuhan laut 	<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan kapal perintis dan subsidi perintis. • Pembangunan dan peningkatan kapasitas pelabuhan utama, pengumpul, dan pengumpan di Lhokseumawe, Belawan, Teluk Bayur, Dumai, Pekan Baru, Palembang, Panjang, Batam, Tanjung Pinang. • Pengelolaan Fasilitas Ekspor dan Impor dengan Pelabuhan/bandara internasional. • Subsidi perintis dan PSO angkutan laut. • Pengelolaan dan Pembangunan Kegiatan di bidang pelabuhan dan pengerukan di Pekanbaru, Palembang.
		<ul style="list-style-type: none"> • NAD • Sumut • Sumbar • Riau • Jambi • Sumsel • Bengkulu • Lampung • Kepulauan Riau • Babel 	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan kapasitas pelabuhan udara 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengelolaan Pelabuhan/bandara internasional. • Pengembangan jalan akses ke bandara.
		<ul style="list-style-type: none"> • Sumsel • Riau 	<ul style="list-style-type: none"> • Mengembangkan sistem jaringan transportasi sungai 	<p>Prioritas Pulau</p> <ul style="list-style-type: none"> • Revitalisasi angkutan sungai.

ISU STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN	WILAYAH	STRATEGI PENGEMBANGAN	FOKUS PRIORITAS / KEGIATAN PRIORITAS
<p>Kualitas sumber daya manusia dan kemiskinan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tingginya tingkat kemiskinan di NAD, Sumatera Selatan, Bengkulu, dan Lampung 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan Sumatera sebagai pool angkatan kerja berkualitas dan berdaya saing regional ASEAN 	<ul style="list-style-type: none"> • NAD • Sumut • Sumbar • Riau • Jambi • Sumsel • Bengkulu • Lampung • Kepulauan Riau • Babel 	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan akses pendidikan dasar, menengah dan tinggi 	<ul style="list-style-type: none"> • Subsidi angkutan perintis sungai penghubung perdesaan di pedalaman. • Fasilitasi permodalan angkutan sungai dan pulau. <p>Prioritas Nasional</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan Akses Pendidikan Dasar-Menengah. • Pemantapan/ rasionalisasi implementasi BOS. • Penurunan harga buku standar di tingkat sekolah dasar dan menengah. • Penyediaan sambungan internet ber-<i>content</i> pendidikan ke sekolah tingkat menengah selambat-lambatnya 2012 dan terus diperluas ke tingkat sekolah dasar. • Peningkatan Akses Pendidikan Tinggi. • Penyesuaian sistem Ujian Akhir Nasional pada 2011. • Penyempurnaan kurikulum sekolah dasar-menengah sebelum tahun 2011 yang diterapkan di 25% sekolah pada 2012 dan 100% pada 2014. • Pemberdayaan peran Kepala Sekolah sebagai manager sistem pendidikan yang unggul. • Revitalisasi peran Pengawas Sekolah sebagai entitas <i>quality assurance</i>. • Mendorong aktivasi peran Komite Sekolah untuk menjamin keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses pembelajaran. • Mendorong aktivasi peran Dewan Pendidikan di tingkat kabupaten. • Penataan ulang kurikulum sekolah yang dibagi menjadi kurikulum tingkat nasional, daerah, dan sekolah dengan memasukkan pendidikan kewirausahaan. • Program remediasi kemampuan mengajar guru. • Penerapan sistem evaluasi kinerja profesional tenaga pengajar. • Peningkatan kerjasama PTN dengan lembaga pendidikan internasional. • Mendorong 11 PT masuk Top 500 THES pada 2014. • Peningkatan perbandingan guru:murid.

ISU STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN	WILAYAH	STRATEGI PENGEMBANGAN	FOKUS PRIORITAS / KEGIATAN PRIORITAS
				<ul style="list-style-type: none"> • Memastikan tercapainya Standar Nasional Pendidikan (SNP) bagi Pendidikan Agama dan Keagamaan paling lambat tahun 2013. <p>Prioritas Pulau</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan beasiswa pendidikan dasar dan Menengah bagi Masyarakat terutama pada penduduk miskin. • Penyelenggaraan Pendidikan Gratis terutama bagi masyarakat miskin. • Pembangunan prasarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah.
			<ul style="list-style-type: none"> • Memperluas jangkauan pelayanan kesehatan, khususnya kepada rumah tangga miskin 	<p>Prioritas Nasional</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak. • Pemberian imunisasi dasar kepada balita. • Penyediaan akses sumber air bersih. • Peningkatan akses sanitasi dasar berkualitas. • peningkatan kualitas layanan rumah sakit berakreditasi internasional. • Pemberlakuan Daftar Obat Esensial Nasional (DOEN) sebagai dasar pengadaan obat di seluruh Indonesia dan pembatasan harga obat generik bermerek. • Perluasan Asuransi Kesehatan Nasional melalui :i) Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin di Puskesmas; ii) Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin di Rumah Sakit; iii) Dukungan Manajemen Pengelolaan, Pembinaan, dan Pengembangan Jaminan Kesehatan. • Pembinaan kesertaan ber KB. • Penguatan Sumberdaya Penyelenggara program KB. • Peningkatan advokasi pada stakeholder. • Peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi pengendalian penduduk dan KB. • Penyediaan data dan informasi program kependudukan dan KB.

ISU STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN	WILAYAH	STRATEGI PENGEMBANGAN	FOKUS PRIORITAS / KEGIATAN PRIORITAS
				<ul style="list-style-type: none"> • Pengendalian Penyakit Menular. • Perbaikan Gizi. • Meningkatnya perencanaan dan pendayagunaan SDM Kesehatan (tenaga kesehatan dan residen senior). • Meningkatnya pelayanan medik spesialistik kepada masyarakat melalui RS bergerak. • Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan melalui puskesmas perawatan. <p>Prioritas Pulau</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pemenuhan dan peningkatan fasilitas sarana dan prasarana. • Pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan, terutama untuk pelayanan kesehatan di puskesmas dan jaringannya, serta RS kab/kota terutama di daerah terpencil dan bencana. • Penyusunan dokumen perencanaan SDM Kesehatan. • Peningkatan pelayanan dan akses kesehatan yang bermutu. • Peningkatan pendidikan gizi masyarakat dan Penanganan Masalah gizi Buruk dan gizi kurang. • Peningkatan akses dan keterjangkauan, air bersih di Babel, Riau, Kepulauan Riau, Riau, Lampung dan Bengkulu.
			<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan akses pelatihan keterampilan kerja 	<p>Prioritas Pulau</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembinaan Lembaga Keuangan daerah Perdesaan. • Peningkatan teknologi tepat guna untuk usaha pertanian di perdesaan.
	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan program penanggulangan kemiskinan 	<ul style="list-style-type: none"> • NAD • Sumut • Sumbar • Riau 	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan efektivitas program penanggulangan kemiskinan menjangkau sasaran rumah tangga miskin 	<ul style="list-style-type: none"> • PNPM • Jamkesmas • Raskin • BOS

ISU STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN	WILAYAH	STRATEGI PENGEMBANGAN	FOKUS PRIORITAS / KEGIATAN PRIORITAS
		<ul style="list-style-type: none"> Jambi Sumsel Bengkulu Lampung Kepulauan Riau Babel 		<ul style="list-style-type: none"> Beasiswa BLT
Kualitas birokrasi dan tata kelola	<ul style="list-style-type: none"> Reformasi birokrasi dan tata kelola 	<ul style="list-style-type: none"> NAD Sumut Sumbar Riau Jambi Sumsel Bengkulu Lampung Kepulauan Riau Babel 	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan kualitas legislasi 	Prioritas Nasional <ul style="list-style-type: none"> Penataan Daerah Otonom dan Otonomi Khusus. Pembinaan dan Fasilitasi Dana Perimbangan. Pembinaan Administrasi Anggaran Daerah. Pembinaan dan Fasilitasi Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah. Pembinaan administrasi pejabat negara di daerah dan DPRD. Pembinaan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian. Pendidikan dan pelatihan Bidang Pemerintahan dan Politik.
			<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan penegakan hukum, HAM, pemberantasan korupsi 	<ul style="list-style-type: none"> Penataan Produk Hukum dan Pelayanan Bantuan Hukum Departemen. Peningkatan integrasi dan integritas penerapan dan penegakan hukum oleh seluruh lembaga dan aparat hukum.
			<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang terukur dan akuntabel 	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan Kapasitas dan Evaluasi Kinerja Daerah. Penetapan dan penerapan sistem indikator kinerja utama pelayanan publik yang selaras antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Pengembangan kawasan perbatasan, pulau-pulau terdepan dan terpencil: <ul style="list-style-type: none"> Tingginya potensi 	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan kawasan perbatasan sebagai beranda depan 	<ul style="list-style-type: none"> NAD Sumatera Utara Riau 	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan stabilitas keamanan dan ketertiban kawasan perbatasan 	Prioritas Nasional <ul style="list-style-type: none"> perundingan penetapan batas maritim Indonesia-Singapura sampai tahun 2014. perundingan penetapan batas maritim Indonesia-Vietnam sampai tahun 2014. Pemetaan batas wilayah negara (joint mapping) koridor perbatasan darat RI-PNG, RI-

ISU STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN	WILAYAH	STRATEGI PENGEMBANGAN	FOKUS PRIORITAS / KEGIATAN PRIORITAS
<p>penyelundupan di kawasan perbatasan, termasuk perdagangan sumber daya alam ilegal ke negara tetangga</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kesenjangan kesejahteraan dengan negara tetangga di kawasan perbatasan 		<ul style="list-style-type: none"> • Kepulauan Riau 		<p>Malaysia dalam skala 1:50.000.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pemetaan pulau-pulau terluar; penataan batas provinsi/kab/kota; pemetaan wilayah provinsi; pemetaan wilayah kabupaten; pemetaan wilayah kota; <i>Border Sign Post</i>. • Perapatan Pilar Batas RI-Malaysia; Perapatan Pilar Batas RI-PNG; Perapatan Pilar Batas RI-RDTL. • Perundingan Teknis Batas Darat; Perundingan Teknis Batas Maritim; Kajian LKI > 200m. • Pengkajian dan pemetaan Batas Negara dan Geopolitik. • Peningkatan kerjasama perbatasan antar negara. • Kerjasama Indonesia – Malaysia dalam bentuk Patroli Terkoordinasi (Patkor Malindo) di Selat Malaka. • Kerjasama keamanan Laut dengan menggelar operasi bersama trilateral Coordinate Patrol Malsindo (Indonesia-Malaysia-Singapura). • Kerjasama Indonesia – Thailand dalam penanganan pelintas batas. • Kerjasama Indonesia – India dalam bentuk Patroli Terkoordinasi (Patkor Indindo). • Pengiriman Liaison Officer (LO) ke negara tetangga yang berbatasan dengan Indonesia. <p>Prioritas Pulau</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelesaian Persoalan Sosial dan Pembangunan. • Meningkatkan upaya pembinaan politik untuk meningkatkan nasionalisme dan rasa kebangsaan. • Penegakkan Hukum dan Keamanan. • Membangun komitmen bersama untuk memberantas kegiatan illegal sekaligus

ISU STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN	WILAYAH	STRATEGI PENGEMBANGAN	FOKUS PRIORITAS / KEGIATAN PRIORITAS
			<ul style="list-style-type: none"> • Mengembangkan kegiatan ekonomi kawasan perbatasan 	<p>menyusun konsep terpadu penanganan perbatasan melalui dengan mengkedepankan pendekatan <i>prosperity</i>.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan Pembinaan teritorial, wilayah, sadar hukum & ketahanan sosbud. • Penertiban Mekanisme Penempatan dan Perlindungan TKI. • Penataan aktivitas lintas batas serta pemantapan pertahanan dan keamanan untuk mengurangi kegiatan ilegal. • Peningkatan kerjasama sub-regional dalam rangka peningkatan keamanan dalam negeri dan peningkatan investasi. • Operasi Militer Selain Perang (OMSP). • Peningkatan/Pembangunan Fasilitas dan Sarpras TNI. • Pembangunan Pos Polisi, Pos Polmas, dan sarana prasana patroli keamanan di kawasan Pos Lintas Batas serta pulau-pulau kecil terluar penghuni. • Peingkatan kemampuan pelayanan administrasi pengelolaan Pos Lintas Batas (PLB). • Peningkatan kemampuan sarana, prasarana, dan pelayanan keimigrasian pada Pos Lintas Batas (PLB). • Peningkatan kemampuan sarana, prasarana, dan pelayanan kepabeanan pada Pos Lintas Batas (PLB). • Pelayanan karantina pertanian dan pengawasan keamanan hayati. • Operasi pemberdayaan Wilayah Pertahanan. <ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan sarpras perbatasan antar negara dan pulau-pulau terluar dalam rangka pelayanan umum pemerintahan. • Peningkatan dan pengembangan wilayah perbatasan antar negara. • Integrasi data dan pelayanan pertanahan nasional secara online. • Pendayagunaan pulau-pulau kecil.

ISU STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN	WILAYAH	STRATEGI PENGEMBANGAN	FOKUS PRIORITAS / KEGIATAN PRIORITAS
				<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya sarpras perbatasan antar negara dan pulau-pulau terluar dalam rangka pelayanan umum pemerintahan. • Kapasitas produksi air minum terpasang khusus untuk menangani kawasan pemekaran, pulau terluar, perbatasan, terpencil. • Pengembangan kebijakan dan koordinasi daerah tertinggal di kawasan perbatasan. • Penanganan jalan nasional dan lintas-lintas utama didaerah-daerah perbatasan, pulau terdepan ataupun terluar. • Pembentukan kerjasama dengan negara-negara tetangga dalam rangka pengamanan wilayah dan sumber daya kelautan. • Revitalisasi Pasar Tradisional. • Integrasi data dan pelayanan pertanahan nasional secara online. • Pendayagunaan pulau-pulau kecil.
<p>Kerawanan bencana dan pengelolaan SDA-LH:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tingginya frekuensi bencana alam terkait kondisi geologi • Tingginya frekuensi bencana alam terkait perbuatan manusia (banjir, longsor, kebakaran hutan) 	<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan wilayah Sumatera yang sesuai dengan daya dukung lingkungan 	<ul style="list-style-type: none"> • NAD • Sumatera Utara • Sumatera Barat • Riau • Jambi • Sumatera Selatan • Lampung • Bengkulu 	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan mitigasi bencana alam 	<p>Prioritas Nasional</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kapasitas aparaturnya pemerintah dan masyarakat dalam usaha pengurangan risiko, mitigasi dan penanganan bencana dan bahaya kebakaran hutan. • Pengendalian Banjir Lahar Gunung Berapi dan Pengamanan Pantai. • Penyiapan peralatan dan logistik di kawasan rawan bencana. <p>Prioritas Pulau</p> <ul style="list-style-type: none"> • Membangun infrastruktur dan bangunan tahan gempa untuk permukiman di kawasan rawan gempa. • Membangun infrastruktur penahan air pasang untuk permukiman di kawasan rawan banjir akibat air pasang. • Mengembangkan teknologi konstruksi infrastruktur dan bangunan tahan gempa. • Pembangunan jaringan jalan yang mendukung proses evakuasi dan penyaluran bantuan

ISU STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN	WILAYAH	STRATEGI PENGEMBANGAN	FOKUS PRIORITAS / KEGIATAN PRIORITAS
			<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan pengelolaan SDA-LH 	<p>bencana.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan jaringan jalan dan interkoneksi untuk menghubungkan ruas-ruas jalan yang tierhenti atau berujung. • Pembangunan jaringan jalan di wilayah perbukitan untuk mempercepat evakuasi penduduk. • Menetapkan kawasan rawan bencana di dalam dokumen RTRW Provinsi atau RTRW Kab/Kota. • Menetapkan arahan pengembangan kawasan permukiman yang dapat mencegah perkembangan permukiman di kawasan rawan bencana. • Pengendalian perkembangan permukiman di kawasan-kawasan rawan bencana. • Menyiapkan aturan <i>zoning regulation</i> sebagai pelengkap dari RTRW Kota. • Tersedianya RDTR yang telah mempertimbangkan mitigasi bencana. • Pembangunan infrastruktur untuk mitigasi bencana • Mengupayakan antisipasi terhadap bencana tanah. longsor dan gempa bumi karena memiliki tingkat kerentanan tanah dan gerakan tanah yang tinggi. • Mengupayakan antisipasi terhadap bencana tanah longsor dan gempa bumi karena memiliki tingkat kerentanan tanah dan gerakan tanah yang tinggi. • Mengupayakan pengendalian banjir melalui pengembangan sistem drainase regional. • Sosialisasi prosedur mitigasi bencana. <p>Prioritas Pulau</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pendampingan dan bantuan teknis kepada masyarakat dalam pengelolaan, pelestarian, perbaikan lingkungan dan sumber daya alam. • Pengendalian pencemaran air, udara, limbah domestik, kegiatan usaha skala kecil menengah dan kerusakan lingkungan sungai dan danau, hutan dan lahan, pesisir dan

ISU STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN	WILAYAH	STRATEGI PENGEMBANGAN	FOKUS PRIORITAS / KEGIATAN PRIORITAS
				<p>laut.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fasilitasi dan bantuan teknis untuk penghijauan kembali lahan-lahan gundul/kritis. • Pendidikan dan Pelatihan Bidang Lingkungan Hidup. • Pengembangan unit penanganan pengaduan masyarakat. • Pengembangan Peraturan Perundang-Undangan Lingkungan. • Peningkatan Penegakan hukum berbasis kearifan lokal. • Penegakan Hukum Lingkungan. • Sosialisasi, Pendampingan dan bantuan teknis kepada aparat daerah dalam penerapan manajemen mitigasi bencana alam. • Pengembangan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. • Pemanfaatan sumber daya lokal untuk mendukung program energi mandiri perdesaan di perdesaan. • Pengelolaan Lingkungan dan Kemandirian Permukiman.



BAB III

PENGEMBANGAN WILAYAH JAWA-BALI TAHUN 2010—2014

3.1 Kondisi Wilayah Jawa Bali Saat Ini

3.1.1 Capaian Pembangunan Wilayah

Seluruh provinsi di wilayah Jawa-Bali menunjukkan kecenderungan pertumbuhan ekonomi yang positif sepanjang tahun 2004 sampai tahun 2008 (**Tabel 3.1**). Selama tahun 2004—2008, rata-rata laju pertumbuhan tertinggi dicapai di Provinsi DKI Jakarta sebesar 6,04 persen, sedangkan rata-rata pertumbuhan terendah terjadi di DI Yogyakarta sebesar 4,54 persen. Sementara itu, provinsi lainnya mengalami pertumbuhan ekonomi dengan rata-rata sebesar 5,5-5,8 persen selama kurun waktu yang sama.

TABEL 3.1
PERTUMBUHAN EKONOMI WILAYAH JAWA-BALI TAHUN 2004 - 2008
ATAS DASAR HARGA KONSTAN TAHUN 2000 (DALAM PERSEN)

Provinsi	2004	2005	2006	2007	2008
DKI Jakarta	5,7	6,0	5,9	6,4	6,2
Jawa Barat	4,8	5,6	6,0	6,5	5,8
Jawa Tengah	5,1	5,3	5,3	5,6	5,5
D.I Yogyakarta	5,1	4,7	3,7	4,3	4,9
Jawa Timur	5,8	5,8	5,8	6,1	5,9
Banten	5,6	5,9	5,6	6,0	5,8
Bali	4,6	5,6	5,3	5,9	6,0

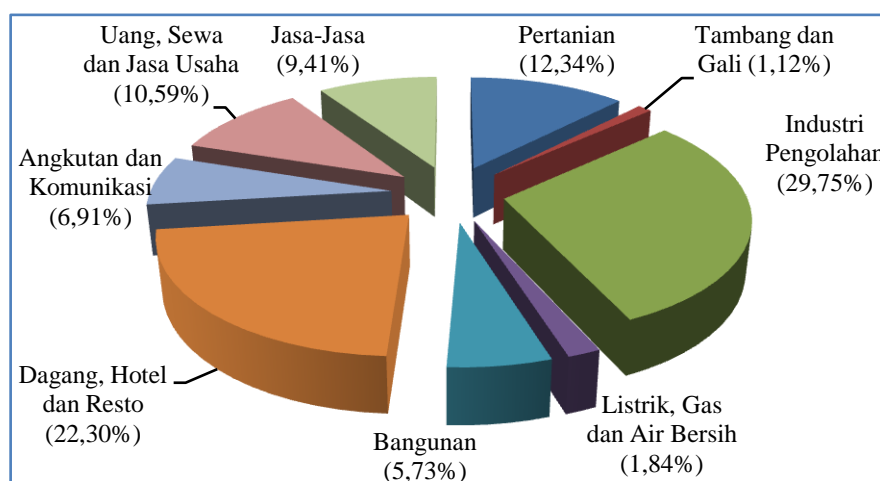
Sumber : Badan Pusat Statistik

Struktur perekonomian wilayah Jawa-Bali ditandai dengan makin berkembangnya sektor sekunder dan tersier. Berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku triwulan 1 tahun 2008, kontribusi sektor industri pengolahan mencapai 29,75 persen, perdagangan hotel dan restoran mencapai 22,30 persen, keuangan persewaan dan jasa perusahaan mencapai 10,59 persen, serta jasa-jasa mencapai 9,41 persen. Kontribusi sektor pertanian masih cukup tinggi, yaitu sebesar 12,34 persen. Tingginya alih fungsi lahan pertanian akan menjadi hambatan

bagi pengembangan sektor pertanian dan menjadi masalah bagi ketahanan pangan di wilayah Jawa-Bali.

Sektor unggulan wilayah Jawa-Bali, antara lain, adalah sektor industri pengolahan di Provinsi Jawa Barat dan Bali; sektor perdagangan, hotel dan restoran di Provinsi Banten dan Jawa Timur; sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan di Provinsi Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali; sektor jasa-jasa di Provinsi Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali, sektor pengangkutan dan komunikasi di Provinsi DKI Jakarta.

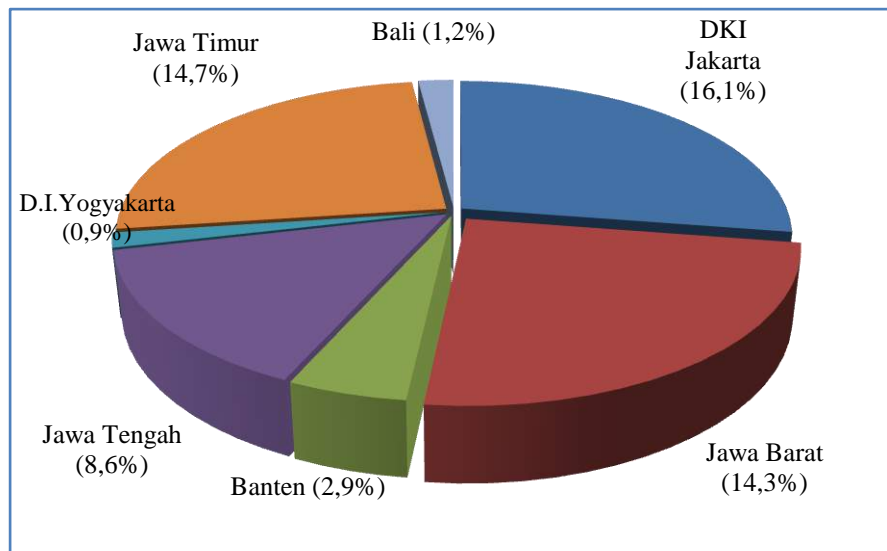
GAMBAR 3.1
KONTRIBUSI EKONOMI WILAYAH JAWA-BALI MENURUT SEKTOR
ATAS DASAR HARGA BERLAKU TRIWULAN I TAHUN 2008



Sumber : Badan Pusat Statistik (diolah)

Secara keseluruhan, kontribusi perekonomian wilayah Jawa-Bali terhadap perekonomian nasional pada tahun 2008 sekitar 58,8 persen. Kontribusi perekonomian wilayah Jawa Bali terhadap perekonomian nasional merupakan yang terbesar, terutama Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Sementara sumbangan provinsi lain terhadap perekonomian nasional masih rendah, yaitu Provinsi DI Yogyakarta sebesar 0,9 persen, Bali sebesar 1,2 persen, dan Banten sebesar 2,9 persen.

GAMBAR 3.2
KONTRIBUSI EKONOMI WILAYAH JAWA-BALI TERHADAP EKONOMI NASIONAL
ATAS DASAR HARGA BERLAKU TAHUN 2008



Sumber : Badan Pusat Statistik (diolah)

Secara nasional, daya tarik investasi wilayah Jawa-Bali sangat tinggi, terbukti dari nilai realisasi investasi yang terpusat di wilayah ini. Dari total nilai realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) pada tahun 2008, lebih dari 91 persen berlangsung di wilayah Jawa Bali. Sedangkan, untuk nilai realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), wilayah ini menyumbang sebesar 60,20 persen. Jika Provinsi DKI Jakarta dan Jawa Barat merupakan lokasi pilihan PMA, maka Jawa Barat dan Jawa Timur merupakan lokasi utama PMDN.

Dalam lima tahun terakhir, PDRB per kapita wilayah Jawa-Bali terus meningkat secara nyata. Namun, perbandingan antarprovinsi menunjukkan adanya ketimpangan yang cukup tinggi antara Provinsi DKI Jakarta dan provinsi lain. Ketimpangan pendapatan per kapita ini menyebabkan tingginya arus migrasi menuju Provinsi DKI Jakarta (**Tabel 3.2**).

TABEL 3.2
PDRB PER KAPITA DENGAN MIGAS WILAYAH JAWA-BALI
TAHUN 2004—2008 ATAS DASAR HARGA KONSTAN TAHUN 2000
(DALAM RIBU RUPIAH)

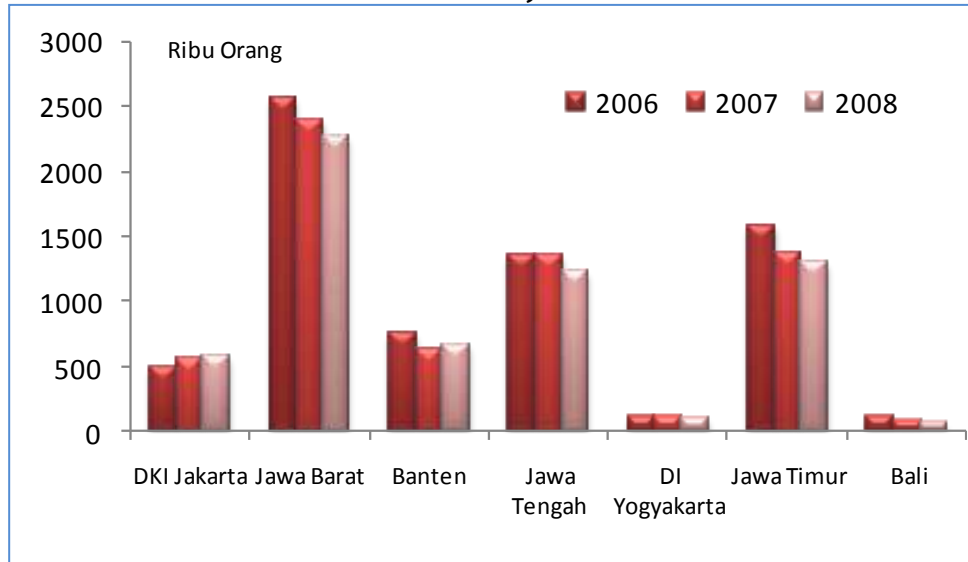
Provinsi	2004	2005	2006	2007	2008
DKI Jakarta	31.832	33.205	34.837	36.733	38.654
Jawa Barat	5.957	6.204	6.480	6.799	7.091
Jawa Tengah	4.173	4.488	4.690	4.914	5.143
D.I Yogyakarta	5.009	5.025	5.157	5.326	5.538
Jawa Timur	6.640	7.027	7.393	7.801	8.217
Banten	6.012	6.406	6.634	6.903	7.168
Bali	5.876	6.188	6.444	6.752	7.082

Sumber : Badan Pusat Statistik

Wilayah Jawa-Bali masih menjadi konsentrasi penduduk Indonesia (sekitar 60 persen dari penduduk Indonesia) dengan luas wilayah Jawa Bali hanya 7 persen dari luas wilayah nasional. Jumlah angkatan kerja di wilayah Jawa-Bali tahun 2000 sebesar 62,7 persen dari total angkatan kerja di Indonesia dan sedikit berkurang menjadi 61,7 persen pada tahun 2008. Jika dilihat dari persebarannya, sebanyak 65,9 persen pengangguran terbuka tahun 2000 berada di wilayah Jawa-Bali dan berkurang sedikit menjadi 64,4 persen pada tahun 2008. Sementara itu, pengangguran terbuka di wilayah Jawa Bali sebesar 6,4 persen dari jumlah angkatan kerja tahun 2000 meningkat menjadi 10 persen pada tahun 2004, dan menurun menjadi 8,8 persen pada tahun 2008.

Pengangguran terbuka dari tahun 2000 sampai tahun 2008 sebagian besar berada di Provinsi Jawa Barat, Jawa Timur dan Jawa Tengah. Berdasarkan data tahun 2008, tingkat pengangguran terbuka di Provinsi DKI Jakarta mencapai 11,1 persen, Jawa Barat 12,3 persen, dan Banten 14,1 persen. Tingkat pengangguran tersebut lebih tinggi dari rata-rata pengangguran wilayah Jawa Bali sebesar 8,8 persen. Tingginya pengangguran disebabkan oleh posisi Jabodetabek yang sangat dominan dalam perekonomian nasional dan menjadi magnet besar bagi pencari kerja sehingga terjadi penumpukan angkatan kerja, baik yang sudah bekerja maupun yang masih menganggur di daerah tersebut.

GAMBAR 3.3
JUMLAH PENGANGGURAN WILAYAH JAWA-BALI TAHUN 2006—2008



Sumber : Badan Pusat Statistik (diolah)

Perkembangan penduduk miskin di wilayah Jawa-Bali dalam periode 2007—2009 cenderung menurun, baik dari jumlah maupun persentase penduduk miskin. Persentase jumlah penduduk miskin wilayah Jawa-Bali pada tahun 2007—2009 mencapai lebih dari 50 persen dari total jumlah penduduk miskin Indonesia. Persentase penduduk miskin sebagian besar berada di Provinsi Jawa Tengah (17,7 persen), DI Yogyakarta (17,2 persen), dan Jawa Timur (16,7 persen). Persentase penduduk miskin di Provinsi DKI Jakarta dan Bali tercatat paling rendah, yaitu masing-masing sebesar 3,6 persen dan 5,1 persen (**Tabel 3.3**).

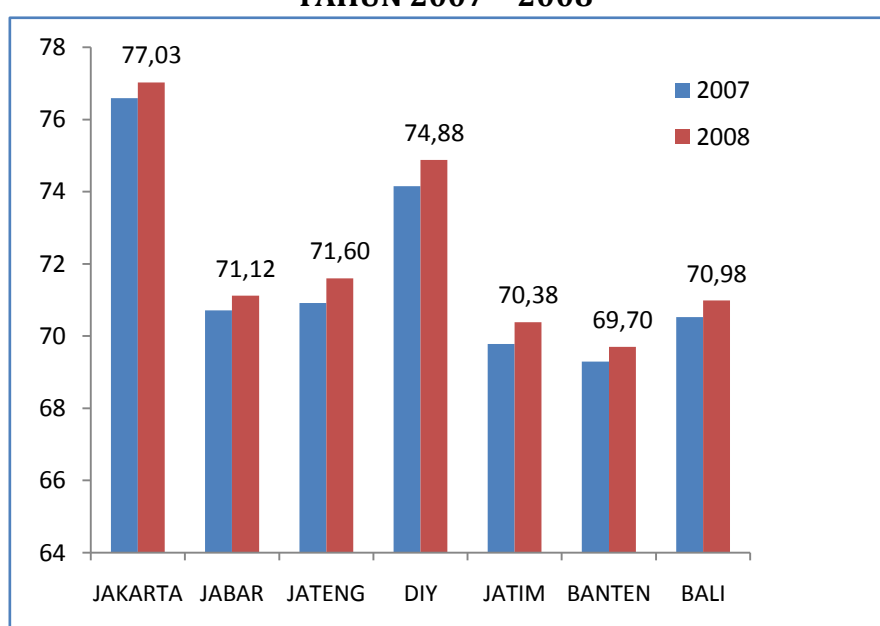
TABEL 3.3
PERSENTASE KEMISKINAN WILAYAH JAWA-BALI TAHUN 2007—2009

Provinsi	2007	2008	2009
DKI Jakarta	4,6	4,3	3,6
Jawa Barat	13,6	13,0	12,0
Jawa Tengah	9,1	8,2	7,6
D.I Yogyakarta	20,4	19,2	17,7
Jawa Timur	19,0	18,3	17,2
Banten	20,0	18,5	16,7
Bali	6,6	6,2	5,1

Sumber : Badan Pusat Statistik

Dari Gambar 3.4 dapat dilihat bahwa kualitas sumber daya manusia wilayah Jawa-Bali ternyata masih perlu ditingkatkan dalam menghadapi persaingan global. IPM tertinggi di Provinsi DKI Jakarta mencapai 77,03, sedangkan IPM terendah di Banten hanya mencapai 69,70 pada tahun 2008. Provinsi Banten, Jawa Timur, Bali, dan Jawa Barat memiliki nilai IPM di bawah rata-rata IPM Nasional 2008 sebesar 71,17.

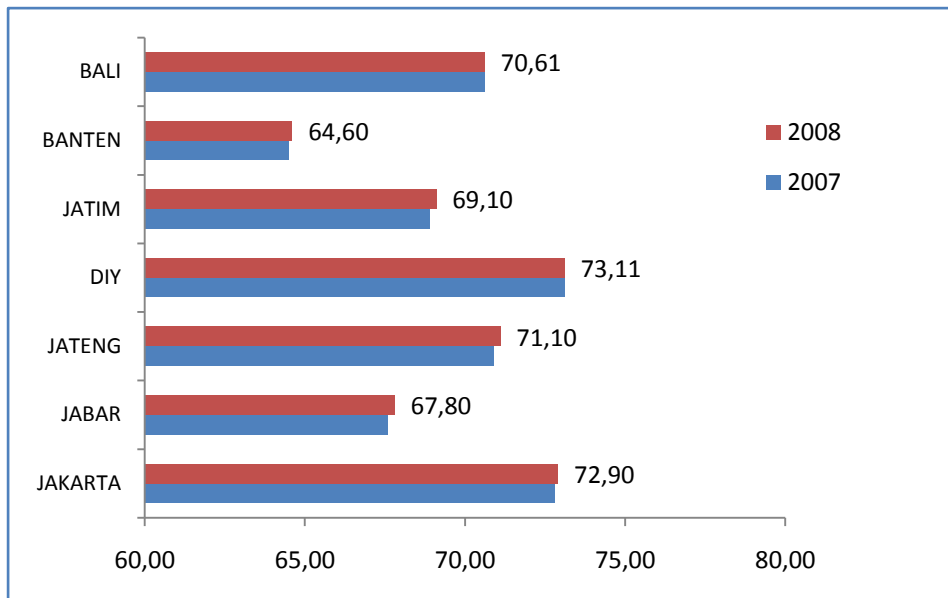
GAMBAR 3.4
INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA WILAYAH JAWA-BALI
TAHUN 2007—2008



Sumber : Badan Pusat Statistik (diolah)

Umur Harapan Hidup (UHH) per provinsi di wilayah Jawa-Bali menunjukkan adanya kesenjangan antarprovinsi. Umur harapan hidup tertinggi di Provinsi DI Yogyakarta, sedangkan umur harapan hidup terendah berada di Banten. Jika dilihat dari umur harapan hidup provinsi, Banten masih jauh tertinggal jika dibandingkan dengan provinsi lain. Perkembangan umur harapan hidup antarprovinsi di wilayah Jawa-Bali dapat dilihat pada Gambar 3.5 sebagai berikut.

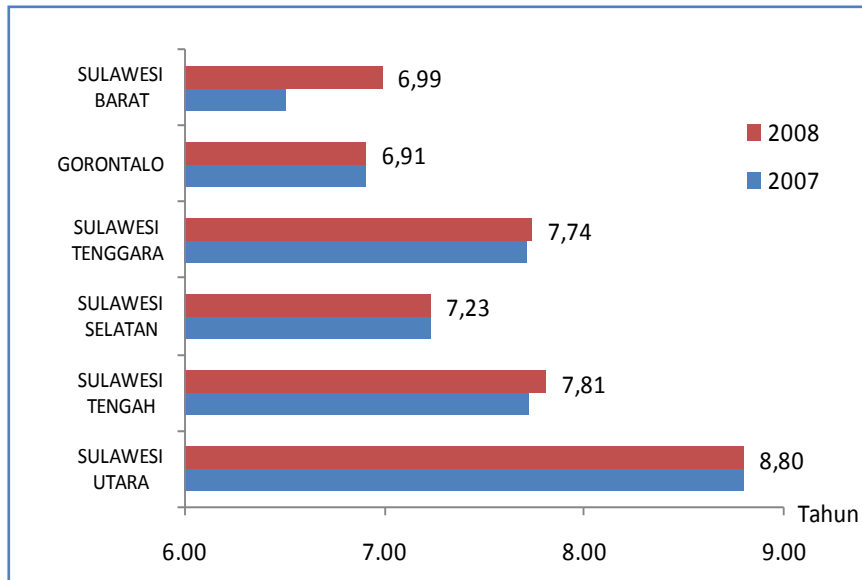
GAMBAR 3.5
UMUR HARAPAN HIDUP WILAYAH JAWA-BALI
TAHUN 2007—2008



Sumber : Badan Pusat Statistik (diolah)

Dalam bidang pendidikan, perkembangan angka rata-rata lama sekolah di beberapa provinsi di wilayah Jawa-Bali pada tahun 2007—2008 menunjukkan kesenjangan antara Provinsi DKI Jakarta dan provinsi lain di wilayah Jawa Bali. Rata-rata lama sekolah terendah berada di Provinsi Jawa Timur dan Jawa Tengah (**Gambar 3.6**).

GAMBAR 3.6
RATA-RATA LAMA SEKOLAH WILAYAH JAWA-BALI
TAHUN 2007—2008



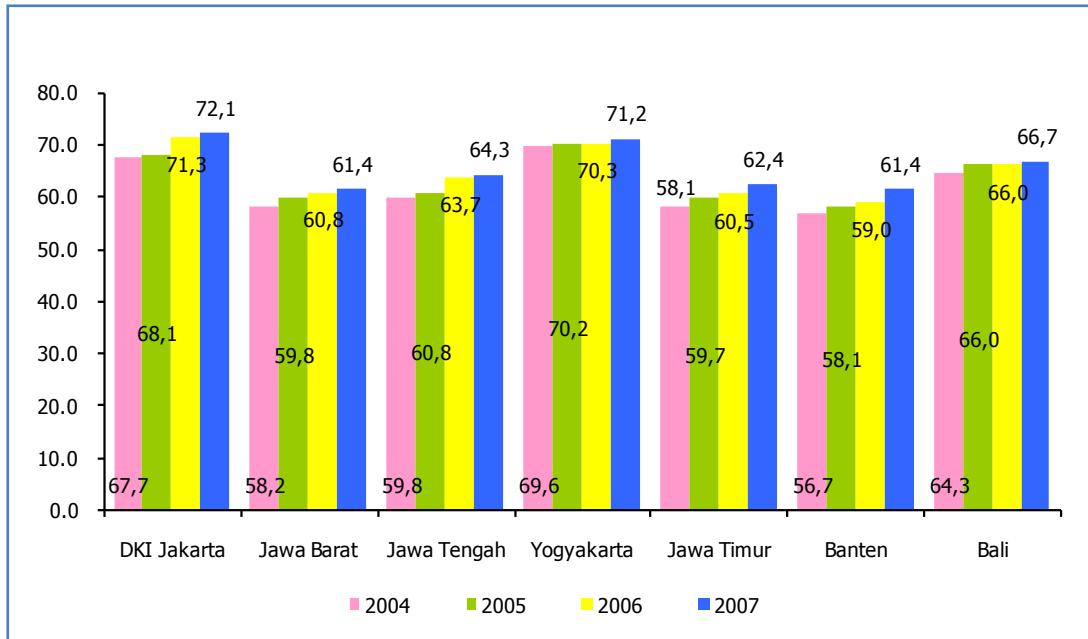
Sumber : Badan Pusat Statistik (diolah)

Demikian pula dengan Indeks Pembangunan Gender (IPG) (*Gender-related Development Index/GDI*) Indonesia, dihitung berdasarkan variabel yang sama dengan IPM menurut jenis kelamin. Di wilayah Jawa-Bali, IPG setiap provinsi meningkat pada tahun 2007. Peringkat tertinggi adalah Provinsi DKI Jakarta, yakni sebesar 72,1 dan diikuti oleh DI Yogyakarta sebesar 71,2. Nilai IPG di empat provinsi lain masih di bawah rata-rata nasional sebesar 65,8. Nilai terendah berada di Provinsi Jawa Barat sebesar 61,4, yang disebabkan oleh rendahnya pendapatan dan umur harapan hidup perempuan. Hal ini menunjukkan masih terjadinya kesenjangan gender antarprovinsi di wilayah Jawa-Bali.

Selain indikator IPG, pembangunan gender juga ditunjukkan dengan indikator *Gender Empowerment Measurement* (GEM) atau Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) diukur melalui partisipasi perempuan dalam bidang ekonomi, politik, dan pengambilan keputusan. Di wilayah Jawa-Bali, IDG tahun 2007 untuk tiap-tiap provinsi juga meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2006 dengan rata-rata nasional sebesar 62,1. DKI Jakarta berada di peringkat tertinggi dengan nilai 62,9, sedangkan Banten berada di peringkat terendah dengan nilai 48,8. Rendahnya nilai tersebut disebabkan oleh rendahnya keterwakilan perempuan di parlemen, proporsi perempuan dalam pekerjaan profesional, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan upah nonpertanian perempuan. Di samping itu, upaya perlindungan perempuan dan anak terutama terhadap berbagai tindak kekerasan juga perlu ditingkatkan dalam lima tahun

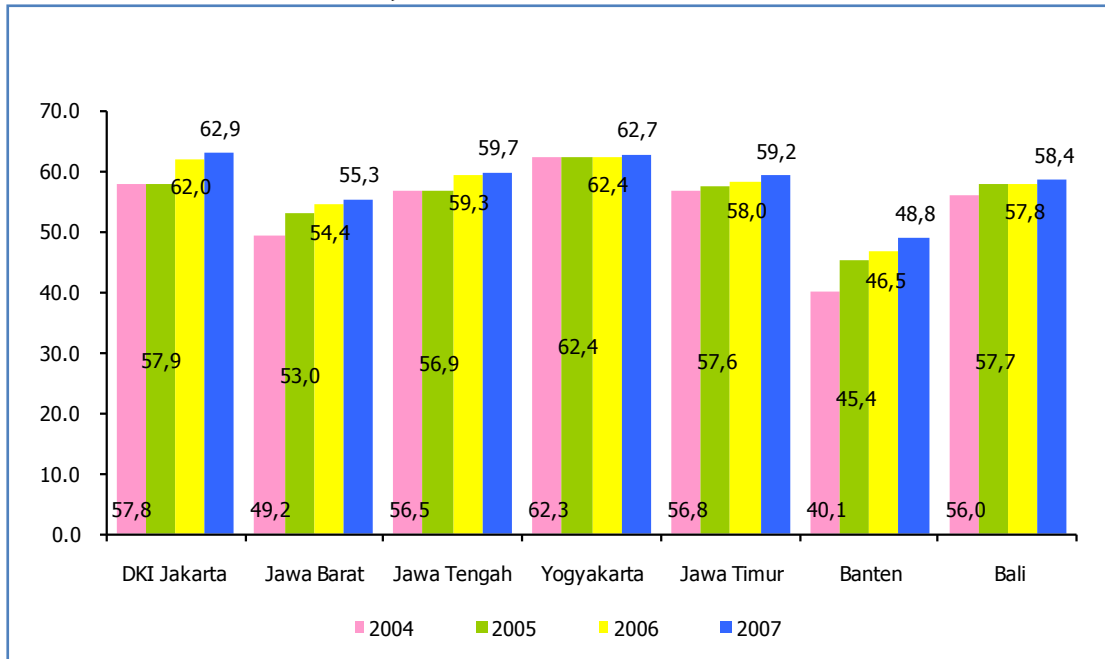
mendatang.

GAMBAR 3.7
PERKEMBANGAN INDEKS PEMBANGUNAN GENDER WILAYAH JAWA-BALI
TAHUN 2004—2007



Sumber: BPS dan Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan (diolah)

GAMBAR 3.8
PERKEMBANGAN INDEKS PEMBERDAYAAN GENDER
WILAYAH JAWA BALI TAHUN 2004—2007



Sumber: BPS dan Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan (diolah)

Dalam bidang ketahanan pangan, wilayah Jawa-Bali merupakan lumbung pangan nasional dengan kontribusi produksi pangan tertinggi. Namun, selama tahun 2002—2006 kontribusi produksi pangan wilayah Jawa-Bali menunjukkan kecenderungan menurun. Dari subsektor peternakan, potensi peternakan di Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur juga cukup besar. Sementara itu, dari perikanan, Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur juga memiliki potensi yang cukup tinggi. Tantangan yang muncul adalah tingginya alih fungsi lahan di wilayah Jawa-Bali yang menghambat upaya mewujudkan ketahanan pangan, baik wilayah maupun nasional.

Keberhasilan dalam penanganan kinerja ekonomi dan sumber daya manusia, dan kemiskinan tidak terlepas dari fasilitas pelayanan publik dan infrastruktur. Kelancaran kegiatan usaha perlu didukung oleh ketersediaan fasilitas atau infrastruktur fisik, seperti jalan raya, kereta api, pelabuhan laut dan udara, sarana komunikasi, dan sumber energi atau penerangan. Aksesibilitas antardaerah di wilayah Jawa-Bali relatif lebih memadai jika dibandingkan dengan wilayah lain. Akses antarwilayah dapat dilalui melalui jalan darat yang dikategorikan ke dalam tiga kelas jalan, yakni jalan nasional, jalan provinsi, dan jalan kabupaten/kota. Berdasarkan rasio panjang jalan dengan luas wilayah yang mengindikasikan kerapatan jalan untuk tingkat provinsi, kerapatan jalan

tertinggi secara nasional terdapat di Provinsi DKI Jakarta, yakni 1,68 km/km², DI Yogyakarta sebesar 1,47 km/km², dan Jawa Tengah sebesar 0,72 km/km². Berdasarkan rasio panjang jalan dengan jumlah kendaraan roda empat yang mengindikasikan kapasitas jalan, kapasitas jalan terendah secara nasional, adalah Provinsi DKI Jakarta sebesar 0,0004 km/unit kendaraan, Bali sebesar 0,0141 km/unit kendaraan, dan Jawa Barat sebesar 0,0190 km/unit kendaraan.

GAMBAR 3.9
PETA POTENSI RAWAN BENCANA ALAM DAN DAERAH TERTINGGAL
WILAYAH JAWA-BALI



Legenda :

- Kawasan Bencana
- Kawasan Bencana dan Daerah Tertinggal

Sumber : Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal (diolah)

Hampir seluruh wilayah Jawa-Bali termasuk wilayah yang rentan terhadap bencana alam baik gempa bumi, longsor, dan banjir. Daerah yang sangat rawan longsor tersebar di wilayah Jawa-Bali, terluas di Provinsi Jawa Barat, Banten dan Jawa Tengah bagian barat. Daerah potensi banjir tersebar, terbanyak di daerah pantura dan kawasan lain yang umumnya daerah rendah, terutama di Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur bagian utara. Daerah rawan banjir banyak terdapat di wilayah pertanian dan perkotaan sehingga akan mengancam ketahanan pangan dan investasi. Wilayah Jawa-Bali juga mengalami serangkaian kejadian bencana alam. Berdasarkan data dan fakta, telah terjadi serangkaian bencana alam berupa gempa di Provinsi

Banten, Jawa Barat, DI Yogyakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Banjir akibat air pasang (rob) di DKI Jakarta, dan Jawa Tengah; meningkatnya tanah longsor di wilayah selatan Jawa yang memiliki struktur tanah labil dan topografi berbukit dan bergunung. Penyebaran daerah rawan bencana secara jelas dapat dilihat pada Gambar 3.9.

Berdasarkan kinerja kelembagaan pemerintahan, kinerja pembangunan wilayah Jawa-Bali masih diwarnai oleh tingkat korupsi yang tinggi. Ibu Kota Provinsi di Jawa-Bali memiliki nilai Indeks Persepsi Korupsi (IPK) yang rendah kecuali Yogyakarta. Kota Semarang berada di urutan ke-21, Surabaya di urutan ke-31, Denpasar di urutan ke-32, Jakarta di urutan ke-36, dan Bandung di urutan ke-43 (TII, 2008). Sementara itu, kinerja pertahanan dan keamanan ternyata masih diwarnai oleh ancaman terjadinya aksi-aksi terorisme. Kejadian peledakan bom di DKI Jakarta dan Bali menelan korban jiwa dan harta benda yang tidak sedikit dan menyebabkan terganggunya aktivitas ekonomi dan investasi.

3.1.2 Isu Strategis

Dari uraian fakta, potensi dan permasalahan di wilayah Jawa-Bali, dapat ditarik beberapa isu strategis di wilayah Jawa-Bali yaitu sebagai berikut:

1. **Ketimpangan pembangunan intra-regional wilayah Jawa-Bali** ditunjukkan oleh rendahnya produktivitas ekonomi kawasan perdesaan; lemahnya keterkaitan desa kota; rendahnya produktivitas ekonomi kawasan selatan Jawa; dan lemahnya keterkaitan utara-selatan Jawa dan keterkaitan antarwilayah di selatan Jawa. Hal ini disebabkan oleh lemahnya akses kepada lahan dan modal serta lemahnya pengembangan kegiatan *off farm* yang menurunkan produktivitas kawasan perdesaan, lemahnya keterkaitan hulu hilir aktivitas ekonomi yang secara spasial memperlemah keterkaitan desa-kota, lemahnya aksesibilitas ke wilayah selatan Jawa dan antarwilayah selatan di Jawa yang memperlemah keterkaitan utara selatan Jawa dan lemahnya pengembangan potensi ekonomi yang ramah lingkungan berupa aktivitas ekowisata.
2. **Menjaga momentum pertumbuhan di Jawa-Bali** ditunjukkan oleh tingginya produktivitas ekonomi dan investasi di Provinsi DKI Jakarta; dan tingginya potensi peningkatan produktivitas ekonomi dan investasi di Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Banten, dan Jawa Timur. Permasalahan yang dapat menjadi hambatan dan ancaman adalah lemahnya birokrasi pengurusan perizinan, lemahnya infrastruktur penunjang investasi terutama transportasi, air bersih dan energi, serta menurunnya daya dukung lingkungan yang ditandai dengan meningkatnya berbagai bentuk gangguan lingkungan terutama banjir, longsor, dan menurunnya kualitas air.
3. **Belum optimalnya potensi peningkatan nilai tambah dari aktivitas perdagangan internasional** ditunjukkan oleh rendahnya ekspor nonmigas yang bernilai tambah tinggi; rendahnya nilai surplus perdagangan internasional di

Provinsi DKI, Jawa Barat, Jawa Tengah; dan belum optimalnya pemanfaatan jalur-jalur perdagangan internasional. Hal ini disebabkan oleh lemahnya pengembangan produk unggulan yang berupa produk olahan nonmigas, masih terbatasnya jaringan perdagangan internasional, dan masih terbatasnya infrastruktur penunjang kegiatan ekspor impor.

4. **Semakin meningkatnya peran sektor sekunder (industri pengolahan) dan tersier (perdagangan dan jasa) dalam perekonomian** ditunjukkan oleh tingginya potensi untuk mengembangkan industri unggulan di Provinsi Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, dan Jawa Timur; dan tingginya potensi sektor jasa pariwisata dan perdagangan di Provinsi DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Jawa Timur, dan Bali. Permasalahan yang dapat menjadi hambatan dan ancaman adalah masih lemahnya pengembangan potensi industri unggulan, masih lemahnya dukungan teknologi dan kapasitas SDM untuk menunjang pengembangan sektor industri dan jasa, dan masih diperlukannya dukungan infrastruktur penunjang sektor industri dan jasa khususnya transportasi, energi dan air bersih.
5. **Terancamnya fungsi wilayah Jawa-Bali sebagai salah satu lumbung pangan nasional** ditunjukkan oleh produksi pertanian pangan yang mulai menurun di Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, dan Bali; tingginya konversi lahan sawah di Jawa Barat dan Jawa Timur; belum optimalnya pemanfaatan potensi peternakan di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur; belum optimalnya pemanfaatan potensi perikanan di DKI, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur; makin menurunnya skala ekonomi aktivitas pertanian di Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur dan Bali; dan makin menurunnya ketersediaan air untuk aktivitas pertanian. Hal ini disebabkan oleh lemahnya penyuluhan dan introduksi teknologi dalam pertanian pangan, lemahnya pengendalian konversi lahan pangan, rendahnya pengembangan potensi ternak besar (sapi potong, sapi perah, kerbau, kambing) dan unggas, rendahnya pengembangan potensi perikanan darat dan perikanan tangkap, menurunnya perluasan lahan petani dan meningkatnya ketimpangan penguasaan lahan, kurangnya pemeliharaan infrastruktur irigasi, dan rusaknya daerah-daerah resapan air.
6. **Tingginya kepadatan dan konsentrasi penduduk di wilayah metropolitan Jabodetabek dan sekitarnya** ditunjukkan oleh konsentrasi penduduk yang tetap terpusat di Jawa dan tingginya laju pertumbuhan penduduk Jawa Barat dan Banten. Hal ini disebabkan oleh lemahnya pengelolaan program transmigrasi yang bertujuan untuk mendorong pemerataan distribusi penduduk dan sekaligus mendorong pembangunan daerah dan lemahnya pengendalian laju pertumbuhan penduduk di Provinsi Jawa Barat dan Banten.
7. **Tingginya tingkat pengangguran di pusat-pusat pertumbuhan ekonomi** ditunjukkan oleh rendahnya penyerapan tenaga kerja dari perkembangan

aktivitas ekonomi di Provinsi Jawa Barat dan Banten dan rendahnya kemampuan wirausaha angkatan kerja terdidik yang masih menganggur di DKI Jakarta. Hal ini disebabkan oleh lemahnya pengembangan aktivitas ekonomi yang mampu mendorong penyerapan tenaga kerja, yaitu industri unggulan yang memiliki keterkaitan hulu hilir dan/atau industri unggulan yang bersifat padat karya, lemahnya kemampuan *entrepreneurship* angkatan kerja.

8. **Tingginya tingkat kemiskinan perdesaan di Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan tingkat kemiskinan perkotaan di DI Yogyakarta** ditunjukkan oleh rendahnya tingkat pendidikan penduduk miskin; rendahnya upah riil penduduk miskin; dan rendahnya produktivitas penduduk miskin. Hal ini disebabkan oleh lemahnya akses penduduk miskin terhadap pendidikan, lemahnya perlindungan terhadap buruh miskin, serta lemahnya bantuan modal untuk mendorong usaha mikro.
9. **Menurunnya daya dukung lingkungan** ditunjukkan oleh rendahnya jenis tutupan lahan hutan di kawasan hutan konservasi di Provinsi Jawa Barat dan Jawa Timur; rendahnya jenis tutupan lahan hutan di kawasan hutan lindung di Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Banten; luas RTH di wilayah kota-kota di Jawa Bali (Provinsi DKI Jakarta, Tangerang, Bekasi, Bandung, Cirebon, Cimahi, Surakarta, Yogyakarta) di bawah amanat UU Penataan Ruang No. 26 tahun 2007 yaitu sebesar 30%; luas tutupan hutan di sebagian besar sub DAS (di luar 10 sub DAS yang telah memiliki tutupan hutan total > 30 persen) di bawah amanat UU Penataan Ruang No. 26 tahun 2007, yaitu sebesar 30 persen; tingginya ancaman bahaya banjir di Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur; tingginya ancaman bahaya longsor di Provinsi Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, DI Yogyakarta dan Jawa Timur; luasnya lahan kritis di Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, DI Yogyakarta dan Bali; makin menurunnya kualitas dan kuantitas air. Hal ini disebabkan oleh lemahnya pengendalian pemanfaatan ruang terutama di kawasan lindung, lemahnya upaya pemeliharaan dan pemulihan untuk kawasan lindung yang mengalami kerusakan; lemahnya pengelolaan tata air; dan pemanfaatan lahan yang tidak memperhatikan kapasitas lahan.
10. **Tingginya kasus tindak pidana korupsi** ditunjukkan oleh tingginya kasus korupsi karena birokrasi yang terlalu kompleks, rendahnya kecepatan pelayanan dan transparansi pengurusan perizinan, dan lemahnya penegakan hukum untuk pemberantasan tindak pidana korupsi. Hal ini disebabkan oleh belum efektifnya reformasi birokrasi agar menjadi lebih efektif dan efisien, belum berkembangnya sistem informasi pengurusan perizinan yang memadai, dan lemahnya kinerja lembaga hukum dalam pemberantasan korupsi.
11. **Tingginya ancaman terorisme terhadap obyek vital** ditunjukkan oleh menurunnya keamanan di objek vital akibat aksi terorisme dan munculnya

gerakan radikal dalam masyarakat yang berpotensi mendorong aksi terorisme. Hal ini disebabkan oleh lemahnya kesadaran masyarakat terhadap bahaya gerakan-gerakan yang dapat menimbulkan aksi terorisme.

12. **Rendahnya kapasitas dan daya saing SDM dalam menghadapi persaingan global** ditunjukkan oleh masih rendahnya kapasitas SDM untuk mengisi kesempatan kerja di sektor sekunder (industri pengolahan) dan tersier (jasa perdagangan dan pariwisata) di Provinsi Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali; Rendahnya IPM di Provinsi Banten, Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Bali terutama terjadi karena Angka Harapan Hidup (AHH) dan Rataan Lama Sekolah (RLS); serta tingginya ancaman penyakit menular. Hal ini disebabkan oleh masih lemahnya pengembangan sekolah kejuruan untuk mengisi kebutuhan tenaga-tenaga terampil, sebaran prasarana kesehatan dan pendidikan yang masih terbatas di lokasi-lokasi yang jauh dari pusat kota, dan lemahnya pemantauan dan pengendalian penyebaran penyakit menular.
13. **Besarnya dampak bencana alam terhadap kehidupan dan aktivitas sosial ekonomi masyarakat** ditunjukkan oleh tingginya kerugian berupa jiwa, harta benda, dan kerusakan infrastruktur di kawasan rawan bencana di Provinsi DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, DI Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan wilayah selatan Jawa. Hal ini disebabkan oleh berkembangnya permukiman di kawasan rawan bencana, belum terbangunnya infrastruktur dan bangunan yang mampu meminimalisasi dampak bencana, dan masih lemahnya kesiapan mitigasi bencana.

3.2 Arah Pengembangan Wilayah

Dengan memperhatikan capaian pembangunan dan isu strategis serta arahan yang tercantum dalam Rancangan Rencana Tata Ruang Pulau Jawa-Bali, pembangunan wilayah Jawa-Bali diarahkan untuk:

1. mengoptimalkan kinerja perekonomian di wilayah Jawa-Bali;
2. meningkatkan kapasitas wilayah Jawa-Bali sebagai lumbung pangan nasional;
3. meningkatkan kapasitas wilayah Jawa-Bali untuk mengembangkan kerja sama internasional.

Dengan memperhatikan rancangan Rencana Tata Ruang Wilayah Jawa-Bali, pengembangan wilayah Jawa-Bali diarahkan untuk (1) mempertahankan Pulau Jawa-Bali sebagai lumbung pangan nasional melalui berbagai upaya menetapkan dan mempertahankan kawasan produksi pangan; (2) mempertahankan dan merehabilitasi kawasan lindung yang semakin terdesak oleh kegiatan budi daya hingga mencapai luasan minimal 30 persen dari keseluruhan luas wilayah Pulau Jawa-Bali, khususnya di Pulau Jawa bagian selatan dan Pulau Bali bagian tengah; (3) mempertahankan sumber

air dan merehabilitasi daerah resapan air untuk menjaga ketersediaan air sepanjang tahun; (4) mengendalikan pertumbuhan pusat-pusat permukiman perkotaan dan perdesaan yang berpotensi mengganggu kawasan-kawasan yang rawan bencana serta mengancam keberadaan kawasan lindung dan kawasan produksi pangan melalui pengendalian aspek kependudukan dan kegiatan sosial-ekonominya; (5) mengendalikan secara ketat pengembangan industri hingga ambang batas toleransi lingkungan yang aman bagi keberlanjutan pembangunan; (6) mengintegrasikan kegiatan industri ke dalam zona-zona dan kawasan-kawasan industri yang telah ditetapkan; (7) mendorong pusat-pusat permukiman perkotaan sebagai pusat pelayanan jasa koleksi dan distribusi di Pulau Jawa-Bali; (8) mengembangkan zona-zona pemanfaatan minyak dan gas untuk wilayah perairan laut dan/atau lepas pantai; (9) meningkatkan upaya pendukung nilai budaya daerah; (10) meningkatkan upaya pengembangan kekayaan budaya daerah; (12) meningkatkan pendukung pengelolaan museum daerah; (13) meningkatkan upaya pengembangan dan pelestarian kesenian; (14) meningkatkan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda; (15) memperluas pengerahan tenaga terdidik untuk pembangunan perdesaan; (16) meningkatkan upaya pemasyarakatan dan pembinaan olahraga; (17) meningkatkan upaya pembinaan olahraga yang bersifat nasional; (18) meningkatkan kerjasama pola kemitraan untuk pembangunan sarana dan prasarana olahraga.

Pengembangan sistem pusat permukiman di wilayah Jawa-Bali ditekankan pada terbentuknya fungsi dan hierarki pusat permukiman sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional yang meliputi Pusat Kegiatan Nasional (PKN), Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), Pusat Kegiatan Lokal (PKL) dan Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) di kawasan perbatasan negara.

Pengembangan PKN di wilayah Jawa-Bali diarahkan untuk (1) mengendalikan pengembangan secara fisik kawasan perkotaan Jabodetabek, perkotaan Bandung, Gerbangkertosusila, dan perkotaan Denpasar sebagai pusat pelayanan primer dengan memperhatikan daya dukung lingkungannya; (2) mendorong pengembangan kawasan perkotaan Yogyakarta dan sekitarnya dan perkotaan Semarang sebagai pusat pelayanan primer; (3) mendorong pengembangan kawasan perkotaan Serang dan sekitarnya, Cilacap dan sekitarnya, Cirebon dan sekitarnya, dan Surakarta dan sekitarnya sebagai pusat pelayanan sekunder.

Pengembangan PKW di wilayah Jawa-Bali diarahkan untuk (1) mendorong pengembangan kota-kota Pandeglang, Rangkas Bitung, Cianjur, Purwakarta-Cikampek, Sumedang, Indramayu, Kadipaten, Tasikmalaya, Boyolali, Klaten, Salatiga, Pekalongan, Kudus, Cepu, Purwokerto, Wonosobo, Magelang, Bantul, Sleman, Jombang, Malang, Probolinggo, Pasuruan, Tuban, Tulung Agung, Kediri, Madiun, Banyuwangi, Sampang, Sumenep, Singaraja, Negara, dan Semarapura sebagai pusat pelayanan sekunder; (2) mengendalikan perkembangan kota-kota Cilegon, Sukabumi, Kuningan, Tegal, Kebumen, dan Situbondo sebagai pusat pelayanan sekunder sesuai dengan daya dukung lingkungannya. Pengembangan PKL di wilayah Jawa-Bali ditetapkan melalui peraturan



daerah provinsi berdasarkan usulan pemerintah kabupaten/kota dengan kriteria sebagaimana ditetapkan dalam RTRWN, dan pengembangan kota-kota PKL merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengembangan sistem pusat permukiman di wilayah Jawa-Bali.

3.3 Tujuan dan Sasaran Pengembangan Wilayah

Berdasarkan arahan pembangunan, tujuan yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang melalui pembangunan wilayah Jawa-Bali adalah untuk:

1. mempertahankan kinerja pembangunan ekonomi wilayah Jawa-Bali sebagai lokomotif pembangunan ekonomi nasional;
2. mempertahankan wilayah Jawa-Bali sebagai lumbung pangan nasional;
3. meningkatkan kapasitas wilayah Jawa-Bali dalam lingkup kerja sama internasional;
4. meningkatnya standar hidup masyarakat Jawa-Bali;
5. mengendalikan pertumbuhan pusat permukiman perkotaan dan perdesaan yang berpotensi mengganggu kawasan yang rawan bencana serta mengancam keberadaan kawasan lindung dan kawasan produksi pangan melalui pengendalian aspek kependudukan dan kegiatan sosial-ekonominya;
6. mempertahankan dan merehabilitasi kawasan lindung yang semakin terdesak oleh kegiatan budi daya hingga mencapai luasan minimal 30 persen dari keseluruhan luas wilayah Pulau Jawa-Bali, khususnya di Pulau Jawa bagian selatan dan Pulau Bali bagian tengah;
7. mempertahankan sumber-sumber air dan merehabilitasi daerah resapan air untuk menjaga ketersediaan air sepanjang tahun;
8. mewujudkan keseimbangan pembangunan wilayah desa-kota dan wilayah utara Jawa bagian utara dan bagian selatan;
9. meningkatkan stabilitas pertahanan dan keamanan melalui pencegahan aksi-aksi terorisme;
10. meningkatkan upaya pemberantasan korupsi.

Dengan demikian, sasaran pengembangan wilayah Jawa-Bali untuk tahun 2010--2014 adalah sebagai berikut :

1. meningkatnya standar hidup masyarakat Jawa-Bali, yang ditunjukkan dengan membaiknya berbagai indikator pembangunan, yaitu pertumbuhan ekonomi,

kemiskinan, pengangguran, angka kematian bayi, angka harapan hidup serta pengangguran;

2. menurunnya konsentrasi penduduk di wilayah Jawa-Bali;
3. mewujudkan kawasan lindung sebesar 30 persen dari wilayah Jawa-Bali;
4. mewujudkan wilayah DAS sebesar 30 persen dari luas wilayah DAS;
5. menurunkan indeks gini PDRB/kapita wilayah Jawa-Bali perdesaan perkotaan dan wilayah utara selatan menjadi < 0.2 ;
6. meningkatnya stabilitas keamanan dari aksi terorisme;
7. membaiknya nilai Indeks Persepsi Korupsi (IPK) untuk kota-kota di wilayah Jawa-Bali.

TABEL 3.4
SASARAN PERTUMBUHAN EKONOMI, KEMISKINAN DAN PENGANGGURAN
DI WILAYAH JAWA-BALI TAHUN 2010—2014

Provinsi	Pertumbuhan Ekonomi (%) ¹⁾		Kemiskinan (%) ²⁾		Pengangguran (%) ³⁾	
	2010	2014	2010	2014	2010	2014
DKI Jakarta	6,5 - 7,1	6,9 - 7,7	2,75 - 2,69	0,54 - 0,53	10,3 - 11,4	8,3 - 9,2
Jawa Barat	5,0 - 5,6	6,2 - 6,8	9,12 - 8,91	4,15 - 4,12	10,4 - 11,5	8,8 - 9,8
Jawa Tengah	6,2 - 6,8	7,1 - 7,7	14,92 - 14,34	11,58 - 11,37	7,1 - 7,8	5,4 - 6,0
DI Yogyakarta	4,8 - 5,3	6,2 - 6,9	15,36 - 15,03	11,87 - 10,76	5,5 - 6,1	4,3 - 4,7
Jawa Timur	5,8 - 6,4	7,1 - 7,8	14,62 - 14,24	11,23 - 10,95	6,5 - 7,2	5,7 - 6,3
Banten	5,9 - 6,4	6,5 - 7,2	6,79 - 6,23	3,13 - 3,09	15,4 - 17,0	14,9 - 16,5
Bali	5,8 - 6,1	6,8 - 7,3	4,12 - 4,01	1,12 - 1,11	4,4 - 4,9	3,4 - 3,7

Sumber : Perhitungan Bappenas;BPS; Susenas

*Keterangan: ¹⁾ *Pertumbuhan Ekonomi: persentase laju perubahan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).*

²⁾ *Kemiskinan: persentase jumlah penduduk miskin terhadap total jumlah penduduk.*

³⁾ *Pengangguran: persentase jumlah pengangguran terbuka terhadap total angkatan kerja.*

TABEL 3.5
SASARAN ANGKA KEMATIAN BAYI, ANGKA HARAPAN HIDUP,
RATA-RATA LAMA SEKOLAH DAN PENDAPATAN PER KAPITA
DI WILAYAH JAWA BALI TAHUN 2010—2014

Provinsi	Angka Kematian Bayi ¹⁾		Rata-Rata Lama Sekolah ²⁾		Angka Harapan Hidup ³⁾		Pendapatan Perkapita (Rp.Ribu) ⁴⁾	
	2010	2014	2010	2014	2010	2014	2010	2014
DKI Jakarta	8	7	11,6	12,4	75,84	76,51	41.394,40	48.539,90
Jawa Barat	27	24	8,10	8,70	70,36	71,41	7.535,00	8.650,10
Jawa Tengah	21	18	7,44	8,08	72,21	73,06	6.183,00	8.402,80
DI Yogyakarta	9	8	8,98	9,46	75,62	76,39	6.346,40	8.372,40
Jawa Timur	25	21	7,46	8,02	71,09	72,27	9.458,60	12.228,40
Banten	32	29	8,50	8,90	69,26	70,06	8.665,00	11.724,10
Bali	13	12	8,24	8,88	70,09	74,48	8.096,20	10.311,10

Sumber : Perhitungan Bappenas;BPS; Susenas

*Keterangan: ¹⁾ Angka Kematian Bayi: jumlah bayi yang meninggal sebelum mencapai usia 1 tahun per 1000 kelahiran hidup.

²⁾ Rata-rata Lama Sekolah: rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani.

³⁾ Angka Harapan Hidup: perkiraan lama hidup rata-rata penduduk.

⁴⁾ Pendapatan per kapita: pendapatan regional dibagi dengan jumlah penduduk pada pertengahan tahun.

3.4 Arah Kebijakan dan Strategi Pengembangan

Berdasarkan arah pengembangan, tujuan dan sasaran serta dengan mempertimbangkan isu strategis wilayah Jawa-Bali, arah kebijakan dan strategi pengembangan wilayah Jawa-Bali tahun 2010—2014 adalah sebagai berikut.

1. Percepatan pembangunan wilayah perdesaan, dilakukan dengan strategi pengembangan sebagai berikut:
 - a. pelaksanaan reformasi agraria untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap lahan di Provinsi Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Banten;

- b. pemberian bantuan permodalan untuk pengembangan usaha tani dan UMKM di wilayah perdesaan di Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, dan Bali;
 - c. pengembangan kegiatan *off farm* untuk meningkatkan nilai tambah di Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DI Yogyakarta, Banten, dan Bali;
 - d. peningkatan ketersediaan infrastruktur pelayanan dasar di desa-desa tertinggal.
2. Penguatan keterkaitan desa kota dilakukan dengan strategi sebagai berikut:
- a. pengembangan rantai industri unggulan agroprimer di Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan DI Yogyakarta.
3. Percepatan pembangunan wilayah selatan Jawa dilakukan dengan strategi sebagai berikut:
- a. pengembangan aksesibilitas ke wilayah selatan Jawa;
 - b. pengembangan PKN Cilacap dan PKN Yogyakarta sebagai pusat pertumbuhan wilayah selatan Jawa;
 - c. pengembangan potensi wisata pantai (ekowisata) di wilayah selatan Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, dan Jawa Timur.
4. Penguatan produktivitas ekonomi dan investasi dengan strategi pengembangan:
- a. menciptakan iklim investasi yang kondusif di Provinsi DKI Jakarta dari aspek perizinan, stabilitas keamanan;
 - b. meningkatkan pembangunan infrastruktur transportasi, air bersih, dan energi;
 - c. menurunkan gangguan lingkungan terutama banjir dan longsor serta meningkatkan kualitas dan kuantitas air di Provinsi Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.
5. Percepatan transformasi struktur ekonomi di Jawa-Bali dilakukan dengan strategi pengembangan sebagai berikut:
- a. pemantapan PKN Jabodetabek sebagai pusat jasa dan perdagangan berkelas internasional;
 - b. pengembangan PKN Gerbangkertosusila, Bandung dan Semarang sebagai pusat pertumbuhan wilayah nasional berbasis jasa perdagangan dan industri.
6. Peningkatan nilai surplus perdagangan internasional dilakukan dengan strategi pengembangan:

- a. meningkatkan jumlah produk industri pengolahan berkualitas ekspor di Provinsi Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur;
 - b. memperluas jaringan perdagangan internasional di Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, dan Jawa Timur;
 - c. mengoptimalkan fungsi pelabuhan hub internasional di Tanjung Priok/Bojonegara, Tanjung Perak/Tanjung Bumi – Surabaya/Madura, dan Tanjung Emas – Semarang untuk menunjang aktivitas ekspor impor;
 - d. mengoptimalkan PKN Semarang dan PKN Gerbangkertosusila sebagai simpul penting perdagangan internasional.
7. Pengembangan industri unggulan potensial dilakukan dengan strategi:
- a. mengembangkan industri unggulan tekstil dan produk tekstil, gula pasir, pupuk, semen di Provinsi Jawa Barat;
 - b. mengembangkan industri unggulan tekstil dan produk tekstil di Provinsi Banten;
 - c. mengembangkan industri unggulan pembekuan ikan dan biota air lainnya, tekstil dan produk tekstil, rokok kretek, gula pasir, semen di Provinsi Jawa Tengah;
 - d. mengembangkan industri unggulan pembekuan ikan dan biota air lainnya, rokok kretek, gula pasir, pupuk di Provinsi Jawa Timur;
 - e. mengembangkan industri kecil dan menengah pada industri kreatif terutama kerajinan, seni pertunjukan, desain, layanan komputer dan piranti lunak, serta riset dan pengembangan di Provinsi DI Yogyakarta.
8. Pengembangan jasa pariwisata dan perdagangan dilakukan dengan strategi sebagai berikut:
- a. mengembangkan teknologi di bidang jasa pariwisata dan perdagangan di Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, DI Yogyakarta, Jawa Timur, dan Bali;
 - b. mengembangkan kualitas SDM di bidang jasa pariwisata dan perdagangan di Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, DI Yogyakarta, Jawa Timur, dan Bali;
9. Mempertahankan fungsi Jawa-Bali sebagai lumbung pangan nasional dilakukan dengan strategi sebagai berikut:
- a. meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman pangan melalui penyuluhan dan introduksi teknologi di Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, dan Bali;

- b. mengendalikan konversi lahan sawah dengan memperhatikan kebijakan tata ruang (RTRW) dan penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Provinsi Jawa Barat, Jawa Timur;
 - c. mengembangkan peternakan domba dan kerbau di Provinsi Jawa Barat;
 - d. mengembangkan peternakan sapi perah dan sapi potong di Provinsi Jawa Timur dan Bali;
 - e. mengembangkan peternakan kambing di Provinsi Jawa Barat dan Jawa Tengah;
 - f. mengembangkan ternak kecil ayam kampung, ayam petelur, dan ayam pedaging di Provinsi Jawa Timur, Jawa Barat, dan Jawa Tengah;
 - g. mengembangkan perikanan tangkap di Provinsi Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan DKI Jakarta;
 - h. mengembangkan perikanan kolam (air tawar) di Provinsi Jawa Barat;
 - i. mengembangkan perikanan tambak di Provinsi Jawa Timur;
 - j. meningkatkan luas pengusahaan lahan petani dan menurunkan ketimpangan penguasaan lahan di Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, dan Bali;
 - k. mengembangkan sistem insentif dan disinentif untuk mengurangi luasan lahan tidur dan lahan terlantar di Provinsi Jawa Barat, Banten, DI Yogyakarta, dan Jawa Timur;
 - l. mendorong transformasi angkatan kerja pertanian ke nonpertanian melalui peningkatan kualitas angkatan kerja di Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali;
 - m. membangun infrastruktur irigasi dan rehabilitasi daerah resapan air di kawasan-kawasan budi daya pertanian di Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, dan Bali.
10. Pengembangan pola distribusi penduduk di wilayah Jawa-Bali secara lebih seimbang dilakukan dengan strategi sebagai berikut:
- a. mengendalikan laju pertumbuhan jumlah penduduk di Provinsi Jawa Barat dan Banten;
 - b. mengembangkan pengelolaan program transmigrasi yang profesional dan mampu mendorong tenaga-tenaga terampil untuk bekerja di luar Jawa;
 - c. mengembangkan kota-kota kecil dan menengah.

11. Pengurangan tingkat pengangguran di pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dilakukan dengan strategi sebagai berikut:
 - a. pengembangan aktivitas ekonomi padat karya yang mampu mendorong penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jawa Barat dan Banten;
 - b. peningkatan kemampuan wirausaha SDM angkatan kerja di Provinsi DKI Jakarta;
 - c. pengendalian migrasi tenaga kerja tanpa keterampilan ke kota-kota besar dan metropolitan.
12. Pengurangan tingkat kemiskinan perdesaan di Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan tingkat kemiskinan perkotaan di Provinsi DI Yogyakarta, dengan strategi sebagai berikut:
 - a. meningkatkan akses penduduk miskin terhadap pendidikan di Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan DI Yogyakarta;
 - b. melindungi buruh miskin perdesaan di Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan buruh miskin perkotaan di Provinsi DI Yogyakarta;
 - c. menyediakan bantuan modal untuk usaha mikro di Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, dan Jawa Timur.
13. Pemeliharaan dan pemulihan fungsi kawasan lindung dilakukan dengan strategi pengembangan sebagai berikut:
 - a. melakukan rehabilitasi dan konservasi hutan di kawasan hutan lindung dan konservasi di Provinsi Jawa Barat dan Jawa Timur;
 - b. meningkatkan luas Ruang Terbuka Hijau (RTH) hingga 30% di Kota DKI Jakarta, Tangerang, Bekasi, Bandung, Cirebon, Cimahi, Surakarta, dan Yogyakarta;
 - c. melakukan rehabilitasi daerah resapan air di Provinsi Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, dan Jawa Timur;
 - d. melakukan rehabilitasi di lahan-lahan yang rawan longsor di Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, dan Jawa Timur.
14. Pemeliharaan dan pemulihan sumber daya air dan lahan dilakukan dengan strategi pengembangan sebagai berikut:
 - a. melakukan rehabilitasi dan konservasi hutan di kawasan DAS;
 - b. melakukan rehabilitasi kawasan sempadan sungai di Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur;
 - c. melakukan rehabilitasi sungai di Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, dan Jawa Timur;

- d. melakukan rehabilitasi lahan kritis di Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, DI Yogyakarta, dan Bali;
 - e. mengendalikan pemanfaatan air tanah di Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, dan Jawa Timur.
15. Penanganan ancaman bencana banjir dan longsor dilakukan dengan strategi pengembangan sebagai berikut:
- a. meningkatkan kesiapan mitigasi bencana banjir di Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, dan Jawa Timur;
 - b. meningkatkan kesiapan mitigasi bencana longsor di Provinsi Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, dan Jawa Timur.
16. Peningkatan pemberantasan korupsi akibat kompleksitas birokrasi, proses perizinan, dan lemahnya penegakan hukum dilakukan dengan strategi sebagai berikut:
- a. melakukan reformasi birokrasi sehingga pelayanan menjadi lebih efektif dan efisien di Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten;
 - b. mengembangkan sistem pengurusan perizinan di Provinsi DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, dan Jawa Timur yang transparan dan akuntabel;
 - c. meningkatkan kredibilitas lembaga hukum di Provinsi DKI Jakarta, Bandung, Cirebon, Purwokerto, Surabaya dan Denpasar.
17. Meminimalkan ancaman terorisme dilakukan dengan strategi pengembangan sebagai berikut:
- a. meningkatkan kemampuan aparat untuk mencegah aksi terorisme di Provinsi DKI Jakarta dan Bali;
 - b. meningkatkan kapasitas dan pemahaman masyarakat terhadap bahaya munculnya gerakan radikal yang dapat memicu aksi terorisme.
18. Pengembangan kapasitas SDM sejalan dengan transformasi ekonomi ke arah sektor sekunder (industri pengolahan) dan tersier (jasa) dilakukan dengan strategi pengembangan sebagai berikut:
- a. pengembangan pendidikan kejuruan dan ketrampilan baik formal maupun non formal di Provinsi Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali.
19. Peningkatan IPM di Provinsi Banten, Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Bali terutama dari komponen AHH dan RLS dilakukan dengan strategi pengembangan sebagai berikut:
- a. meningkatkan akses masyarakat terhadap infrastruktur kesehatan di Provinsi Jawa Barat, Jawa Timur dan Banten;



- b. meningkatkan akses masyarakat terhadap infrastruktur pendidikan di Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Bali;
 - c. mengendalikan dan mencegah penyebaran berbagai penyakit menular di Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, dan Bali.
20. Minimalisasi dampak kerugian akibat kejadian bencana alam dilakukan dengan strategi pengembangan sebagai berikut:
- a. mengendalikan perkembangan permukiman di kawasan-kawasan rawan bencana di Provinsi DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, DI Yogyakarta, Jawa Tengah Jawa Timur dan Bali;
 - b. mengembangkan infrastruktur dan bangunan yang mampu menahan dampak bencana di Provinsi DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, DI Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Bali;
 - c. mengembangkan kesiapan mitigasi bencana di kawasan-kawasan rawan bencana di Provinsi DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, DI Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Bali.

MATRIK BUKU III RPJMN 2010-2014 WILAYAH JAWA-BALI
ISU STRATEGIS, ARAH KEBIJAKAN, WILAYAH, STRATEGI PEMBANGUNAN, DAN FOKUS PRIORITAS

ISU STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN	WILAYAH	STRATEGI PENGEMBANGAN	FOKUS PRIORITAS / KEGIATAN PRIORITAS
Ketimpangan Pembangunan Intra-Regional Wilayah Jawa- Bali.	Percepatan pembangunan wilayah perdesaan.	<ul style="list-style-type: none"> • Jawa Barat • Jawa Timur • Jawa Tengah • Banten 	Pelaksanaan reforma agraria untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap lahan di Provinsi Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Banten.	<p>Prioritas nasional</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penataan regulasi untuk menjamin kepastian hukum atas lahan pertanian. <p>Prioritas Pulau</p> <ul style="list-style-type: none"> • Inventarisasi lahan untuk reforma agraria. • Penentuan masyarakat (subyek) penerima lahan dan/atau penerima akses terhadap lahan. • Penyusunan kelembagaan penguatan redistribusi lahan dan/atau akses masyarakat terhadap lahan. • Monitoring dan Evaluasi.
		<ul style="list-style-type: none"> • Jawa Barat • Jawa Tengah • Jawa Timur • Banten • DIY • Bali 	Pemberian bantuan permodalan untuk pengembangan usaha tani dan UMKM di wilayah perdesaan di Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, Bali.	<p>Prioritas Nasional</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan investasi pangan, pertanian, dan industri perdesaan berbasis produk lokal oleh pelaku usaha dan pemerintah. <p>Prioritas Pulau</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penyiapan jumlah dan fokus bantuan modal • Penentuan masyarakat (obyek) penerima modal. • Pengembangan kelembagaan pengelola bantuan modal. • Penguatan institusi permodalan. • Penyiapan kelembagaan masyarakat sebagai mitra institusi permodalan mikro.
		<ul style="list-style-type: none"> • Jawa Barat 	Mengembangkan kegiatan <i>off farm</i>	Prioritas Nasional

ISU STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN	WILAYAH	STRATEGI PENGEMBANGAN	FOKUS PRIORITAS / KEGIATAN PRIORITAS
		<ul style="list-style-type: none"> • Jawa Tengah • Jawa Timur • DIY • Banten • Bali 	untuk meningkatkan nilai tambah.	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan investasi pangan, pertanian, dan industri perdesaan berbasis produk lokal oleh pelaku usaha dan pemerintah. • Pengembangan penanganan pasca panen pertanian. • Pengembangan pengolahan hasil pertanian. <p>Prioritas Pulau</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penyiapan kapasitas SDM.
		<ul style="list-style-type: none"> • Jawa Barat • Jawa Tengah • Jawa Timur • DIY • Banten • Bali 	Meningkatkan ketersediaan infrastruktur pelayanan dasar di desa-desa tertinggal.	<p>Prioritas Nasional</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan pelayanan Kesehatan yang berkualitas dan terjangkau di Daerah Tertinggal. • Peningkatan pelayanan pendidikan di Daerah Tertinggal. • Peningkatan sarana dan prasarana penyediaan energi listrik, telekomunikasi, irigasi, dan air bersih. • Peningkatan aksesibilitas daerah tertinggal dengan pusat pertumbuhan.
	Penguatan keterkaitan desa kota	<ul style="list-style-type: none"> • Jawa Barat • Jawa Tengah • Jawa Timur • DIY • Bali 	Mengembangkan keterkaitan desa-kota melalui pengembangan rantai industri unggulan agroprimer di Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DI Yogyakarta.	<p>Prioritas Nasional</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengadaan sarana transportasi perdesaan. • Pembangunan pembangkit dan jaringan transmisi untuk sentra produksi pertanian. • Pembangunan dan pemeliharaan teknologi komunikasi dan sistem informasi nasional yang melayani daerah-daerah sentra produksi pertanian demi peningkatan kuantitas dan kualitas produksi serta kemampuan pemasarannya. <p>Prioritas Pulau</p>

ISU STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN	WILAYAH	STRATEGI PENGEMBANGAN	FOKUS PRIORITAS / KEGIATAN PRIORITAS
				<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan kawasan agropolitan di Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DI Yogyakarta, Bali • Pengembangan keterkaitan input output / hulu hilir sistem agroindustri. • Penyiapan kelembagaan kemitraan petani – industri kecil – industri besar.
	Percepatan pembangunan wilayah selatan Jawa	<ul style="list-style-type: none"> • Banten • Jawa Barat • Jawa Tengah • DIY • Jawa Timur 	Pengembangan aksesibilitas ke wilayah selatan Jawa.	<p>Prioritas Pulau</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pemantapan fungsi jalan-jalan pengumpan Jalur lintas Utara, Tengah, dan Selatan. • Peningkatan aksesibilitas kawasan tertinggal di Pesisir Selatan Pulau Jawa.
		<ul style="list-style-type: none"> • Jawa Tengah • DIY 	Pengembangan PKN Cilacap dan PKN Yogyakarta sebagai pusat pertumbuhan wilayah selatan Jawa.	<p>Prioritas Pulau</p> <ul style="list-style-type: none"> • Integrasi jaringan jalan Lintas Selatan, jalan pengumpan, jalan bebas hambatan, dan jalur kereta api Utara-Selatan yang terpadu dengan pelayanan pelabuhan laut Tanjung Intan yang berkelas internasional serta Bandara Tunggul Wulung sebagai pusat penyebaran tersier dari Kota Cilacap menuju pusat distribusi. • Pengembangan simpul jaringan penyeberangan lintas antar provinsi dengan interaksi kuat di Pulau Jawa-Bali yang melalui jalur Majingklak-Cilacap. • Pengendalian pertumbuhan kawasan perkotaan Yogyakarta bagian selatan. • Pemantapan keterkaitan fungsional kota Yogyakarta dengan kota-kota yang merupakan pusat pertumbuhan

ISU STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN	WILAYAH	STRATEGI PENGEMBANGAN	FOKUS PRIORITAS / KEGIATAN PRIORITAS
				<p>wilayah di P. Jawa dan di luar P. Jawa.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kapasitas dan kualitas pelayanan utilitas kota yang memenuhi standar baku nasional. • Peningkatan kualitas lingkungan hidup yang menjamin kesejahteraan dan kreativitas. • Pengembangan pusat industri pengolahan ikan dan pariwisata bahari.
		<ul style="list-style-type: none"> • Jawa Barat • Banten • Jawa Tengah • DIY • Jawa Timur 	Pengembangan potensi wisata pantai (ekowisata) di wilayah selatan Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, dan Jawa Timur.	<p>Prioritas Pulau</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perbaikan iklim investasi di bidang pariwisata. • Peningkatan promosi wisata. • Peningkatan kualitas lingkungan untuk menunjang wisata pantai.
Menjaga momentum pertumbuhan di Jawa-Bali	Penguatan produktivitas ekonomi dan investasi	<ul style="list-style-type: none"> • DKI • Jawa Barat • Banten • Jawa Timur 	Menciptakan iklim investasi yang kondusif di Provinsi DKI Jakarta dari aspek perijinan, stabilitas keamanan.	<p>Prioritas Pulau</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penyederhanaan mekanisme perijinan. • Peningkatan transparansi dan akuntabilitas lembaga perijinan. • Peningkatan stabilitas keamanan.
		<ul style="list-style-type: none"> • Jawa Barat • Jawa Tengah • Banten • Jawa Timur 	Meningkatkan pembangunan infrastruktur transportasi, air bersih, dan energi.	<p>Prioritas Nasional</p> <ul style="list-style-type: none"> • Konsolidasi kebijakan penanganan dan pemanfaatan tanah untuk kepentingan umum secara menyeluruh dibawah satu atap dan pengelolaan tata ruang secara terpadu • Pembangunan Jalan Lintas Jawa, Bali • Preservasi jalan nasional lintas Jawa-Bali, Peningkatan kapasitas jalan nasional lintas terutama lintas pantai Utara Jawa dan jalan strategis nasional terutama lintas

ISU STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN	WILAYAH	STRATEGI PENGEMBANGAN	FOKUS PRIORITAS / KEGIATAN PRIORITAS
				<p>Selatan Jawa, serta pembangunan fly over</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penerapan dan penataan sistem logistik nasional di wilayah Jawa-Bali • Pembangunan jalan tol Kota Bandung, Jalan tol Cileunyi-Sumedang- Dawuan, Solo-Mantingan-Kertosono, dan Serangan-Tanjung Benoa • Peningkatan dan rehab jalan KA Terbangunnya elektrifikasi jalan KA di Bandung, jalur ganda ganda Manggarai-Cikarang, 1 paket lingkaran Jabodetabek; Terbangunnya elektrifikasi jalan KA sepanjang (Serpong - Maja new track, Duri - Tangerang new track, Citayam - Nambo); Terbangunnya jalur ganda Cirebon - Kroya (segmen I dan III serta lanjutan segmen II); Terbangunnya jalur ganda Lintas Selatan Jawa (Kroya - Kutoarjo); Terbangunnya jalur ganda Lintas Utara Jawa (lanjutan Tegal - Pekalongan dan Cirebon - Brebes); Pengembangan Jaringan Kereta Api Perkotaan di Surabaya dan Bandung (elektrifikasi, jalur ganda, dll); Pembangunan Jalur Kereta Api dari Stasiun Manggarai ke Bandara Soekarno Hatta. • Pembangunan/peningkatan Pelabuhan a.l. Tg.Priok, Tg.Emas, Tg.Perak, Bojonegara, dan Benoa serta pelabuhan terpilih lainnya; subsidi perintis dan PSO angkutan laut. • Pengembangan/Rehabilitasi Bandara Husein Sastranegara, Nusawiru, Cakrabhuwana, Budiarto,

ISU STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN	WILAYAH	STRATEGI PENGEMBANGAN	FOKUS PRIORITAS / KEGIATAN PRIORITAS
				<p>Soekarno-Hatta, Halim Perdanakusuma, Adi Sumarmo, Ahmad Yani, Tunggul Wulung, Dewa Daru, Adi Sutjipto, Gading, Abdurahman Saleh, Hadi Notonegoro, Kangean, Blimbingsari, Bawean, Juanda, Trunojoyo, Ngurah Rai.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan navigasi dan sistem telekomunikasi pelayaran (VTS, AIS) di wilayah Jawa dan Selat Sunda ; pengerukan alur pelayaran di pelabuhan Tg.Priok, Tg.Emas, Tg.Perak, Bojonegara, Benoa. • Peningkatan Kapasitas Pembangkit, Jaringan dan Gardu Transmisi Listrik. • Penggunaan gas alam sebagai bahan bakar angkutan umum perkotaan. <p>Prioritas Pulau</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pemantapan skema kerjasama pemerintah- swasta dalam penyediaan infrastruktur.
		<ul style="list-style-type: none"> • Jawa Barat • Banten • Jawa Tengah • Jawa Timur 	<p>Menurunkan gangguan lingkungan terutama banjir dan longsor serta meningkatkan kualitas dan kuantitas air di Provinsi Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur</p>	<p>Prioritas Nasional</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan Bendungan Jatigede di Jabar, Karian dan Sindang Heula di Banten, Diponegoro, Jatibarang, Pidekso, Gondang, Kendang di Jateng, Bajulmati di Jatim. • Rehabilitasi Waduk Malahayu, Darma dan Jatiluhur di Jabar; Waduk Krisak, Kedung Uling, Cengklik, Ketron, Penjalin, Cacaban, Tempuran, Nglangon, Greneng, Simo, Sanggeh, Wadaslintang, Sempor, Plumbon,

ISU STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN	WILAYAH	STRATEGI PENGEMBANGAN	FOKUS PRIORITAS / KEGIATAN PRIORITAS
				<p>Gembong dan Wonogiri di Jateng; Waduk Gondang, Pacal, Karangates, Selorejo, Wonorejo, Wlingi, Sengguruh, Sampean Baru di Jatim.</p> <p>Prioritas Pulau</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penegakan hukum dalam pengendalian pemanfaatan ruang. • Konservasi kawasan lindung. • Rehabilitasi dan konservasi Daerah Aliran Sungai. • Pengendalian pemanfaatan sumber daya air tanah
	Percepatan transformasi struktur ekonomi di Jawa-Bali	<ul style="list-style-type: none"> • DKI 	Pemantapan PKN Jabodetabek sebagai pusat jasa dan perdagangan berkelas internasional	<p>Prioritas Nasional</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penyelesaian pembangunan angkutan kereta listrik di Jakarta (MRT dan monorail) selambat-lambatnya 2014. • Pengembangan Sistem angkutan perkotaan di Surabaya, Bandung dan Jakarta termasuk pembangunan ITS untuk Jabodetabek. • Jalur KA Pasoso-Pelabuhan Tanjung Priok, dan pembangunan jalur ganda manggarai Cikarang. <p>Prioritas Pulau</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kualitas pelayanan publik • Pemantapan pasar modal • Mengembangkan kegiatan promosi dan pola kerjasama investasi dengan kota-kota pusat ekonomi dunia • Menyiapkan SDM terdidik dan berketrampilan • Pengendalian banjir melalui pengembangan sistem

ISU STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN	WILAYAH	STRATEGI PENGEMBANGAN	FOKUS PRIORITAS / KEGIATAN PRIORITAS
				<p>drainase regional.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kapasitas dan kualitas pelayanan utilitas kota (jalan, persampahan, air bersih, dst.) yang memenuhi standar Internasional. • Peningkatan kerjasama antardaerah dalam pemanfaatan ruang dan sumber daya di wilayah Jabodetabekpunjur.
		<ul style="list-style-type: none"> • Jawa Timur • Jawa Barat • Jawa Tengah • Banten 	<p>Pengembangan PKN Gerbangkertosusila, Bandung dan Semarang sebagai pusat pertumbuhan wilayah nasional berbasis jasa perdagangan dan industri.</p>	<p>Prioritas Nasional</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan Sistem angkutan perkotaan di Surabaya, Bandung dan Jakarta termasuk pembangunan ITS untuk Jabodetabek. • Pembangunan jalan akses Tanjung Priok dan jalan akses Juanda Surabaya <p>Prioritas Pulau</p> <ul style="list-style-type: none"> • Memantapkan keterkaitan fungsional kota dengan kota-kota yang merupakan pusat pertumbuhan wilayah di P. Jawa dan di luar P. Jawa. • Meningkatkan kapasitas dan kualitas pelayanan PSD kota yang memenuhi standar Internasional. • Meningkatkan kemampuan kerjasama pembangunan antar kota dan pengendalian pemanfaatan ruang dan sumber daya di wilayah Metropolitan Gerbangkertosusila, Bandung, dan Semarang. • Meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang menjamin kesejahteraan dan kreativitas.
Belum Optimalnya Potensi Peningkatan Nilai Tambah dari Aktivitas	Peningkatan nilai surplus perdagangan internasional	<ul style="list-style-type: none"> • Jawa Barat • Banten 	Meningkatkan jumlah produk industri pengolahan berkualitas ekspor di	<p>Prioritas Pulau</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan standard mutu kualitas produk ekspor.

ISU STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN	WILAYAH	STRATEGI PENGEMBANGAN	FOKUS PRIORITAS / KEGIATAN PRIORITAS
Perdagangan Internasional		<ul style="list-style-type: none"> • Jawa Tengah • Jawa Timur 	Provinsi Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur.	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan teknologi pengolahan produk ekspor. • Pengembangan kinerja industri bersertifikasi internasional.
		<ul style="list-style-type: none"> • DKI • Jawa Barat • Banten • Jawa Timur 	Memperluas jaringan perdagangan internasional di Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Timur.	<p>Prioritas nasional</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengelolaan Fasilitasi Ekspor dan Impor. <p>Prioritas Pulau</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan kerjasama perdagangan dalam lingkup internasional. • Meningkatkan promosi produk ekspor.
		<ul style="list-style-type: none"> • DKI • Banten • Jawa Tengah • Jawa Timur 	Mengoptimalkan fungsi pelabuhan Hub Internasional di Tanjung Priok/Bojonegara, Tanjung Perak/Tanjung Bumi – Surabaya/Madura, dan Tanjung Emas – Semarang, di DKI, Banten, Jawa Tengah dan Jawa Timur untuk menunjang aktivitas ekspor impor.	<p>Prioritas Nasional</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan/peningkatan Pelabuhan a.l. Tg.Priok, Tg.Emas, Tg.Perak, Bojonegara, dan Benoa serta pelabuhan terpilih lainnya; subsidi perintis dan PSO angkutan laut. • Pembangunan navigasi dan sistem telekomunikasi pelayaran (VTS, AIS) di wilayah Jawa dan Selat Sunda ; pengerukan alur pelayaran di pelabuhan Tg.Priok, Tg.Emas, Tg.Perak, Bojonegara, Benoa • Pengelolaan dan Pembangunan Kegiatan di bidang pelabuhan dan pengerukan <p>Prioritas Pulau</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mewujudkan kelembagaan pengelola pelabuhan yang profesional dan transparan • Peningkatan kerjasama ekonomi untuk mendorong intensitas perdagangan internasional
		<ul style="list-style-type: none"> • Jawa Tengah 	Optimalisasi PKN Semarang dan PKN	Prioritas Pulau

ISU STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN	WILAYAH	STRATEGI PENGEMBANGAN	FOKUS PRIORITAS / KEGIATAN PRIORITAS
		<ul style="list-style-type: none"> • Jawa Timur 	Gerbangkertosusila sebagai simpul penting perdagangan internasional.	<ul style="list-style-type: none"> • Mengembangkan kegiatan promosi dan pola kerjasama investasi dengan kota-kota pusat ekonomi Asia. • Menyiapkan kelembagaan dan SDM yang memadai untuk dapat mengelola kerjasama dengan kota-kota pusat ekonomi Asia. • Menyiapkan infrastruktur, produk, teknologi dan SDM yang berstandar internasional .
Semakin Meningkatnya peran Sektor Sekunder (Industri Pengolahan) dan Tersier (Perdagangan dan Jasa) dalam Perekonomian	Pengembangan industri unggulan potensial	<ul style="list-style-type: none"> • Jawa Barat 	Mengembangkan industri unggulan tekstil dan produk tekstil, gula pasir, pupuk, semen di Provinsi Jawa Barat.	Prioritas Pulau <ul style="list-style-type: none"> • Penetapan kawasan industri. • Peningkatan investasi. • Pengembangan sarana prasarana penunjang industri. • Penyiapan SDM.
		<ul style="list-style-type: none"> • Banten 	Mengembangkan industri unggulan unggulan tekstil dan produk tekstil di Provinsi Banten.	Prioritas Pulau <ul style="list-style-type: none"> • Penetapan kawasan industri • Peningkatan investasi • Pengembangan sarana prasarana penunjang industri • Penyiapan SDM
		<ul style="list-style-type: none"> • Jawa Tengah 	Mengembangkan industri unggulan pembekuan ikan dan biota air lainnya, tekstil dan produk tekstil, rokok kretek , gula pasir, semen di Provinsi Jawa Tengah.	Prioritas Pulau <ul style="list-style-type: none"> • Penetapan kawasan industri • Peningkatan investasi • Pengembangan sarana prasarana penunjang industri • Penyiapan SDM
		<ul style="list-style-type: none"> • Jawa Timur 	Mengembangkan industri unggulan pembekuan ikan dan biota air lainnya, rokok kretek, gula pasir,pupuk di	Prioritas Pulau <ul style="list-style-type: none"> • Penetapan kawasan industri • Peningkatan investasi

ISU STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN	WILAYAH	STRATEGI PENGEMBANGAN	FOKUS PRIORITAS / KEGIATAN PRIORITAS
			Provinsi Jawa Timur.	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan sarana prasarana penunjang industri • Penyiapan SDM
		<ul style="list-style-type: none"> • DIY 	Mengembangkan industri kecil dan menengah pada industri kreatif terutama Kerajinan, seni pertunjukkan, desain dan layanan komputer & piranti lunak, serta riset & pengembangan di Provinsi DIY.	<p>Prioritas Nasional</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan sarana yang memadai bagi pengembangan, pendalaman dan pagelaran seni budaya di kota besar dan ibukota kabupaten • Penelitian dan Pengembangan Bidang Kebudayaan • Pelestarian dan Pengembangan Kesenian <p>Prioritas Pulau</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan investasi • Pengembangan teknologi dan sistem informasi • Penyiapan SDM
	Pengembangan jasa pariwisata dan perdagangan	<ul style="list-style-type: none"> • DKI Jakarta • Jawa Barat • Banten • DIY • Jawa Timur • Bali 	Mengembangkan teknologi di bidang jasa pariwisata dan perdagangan di Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, DIY, Jawa Timur, dan Bali.	<p>Prioritas Nasional</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan Pengelolaan Peninggalan Kepurbakalaan • Penelitian dan Pengembangan Bidang Arkeologi • Penelitian dan Pengembangan Bidang Kebudayaan • Pelestarian dan Pengembangan Kesenian <p>Prioritas Pulau</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan sistem informasi sektor jasa pariwisata dan perdagangan • Pengembangan objek wisata budaya dan edukasi
		<ul style="list-style-type: none"> • DKI Jakarta • Jawa Barat • Banten 	Mengembangkan kualitas SDM di bidang jasa pariwisata dan perdagangan di Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, DIY, Jawa Timur, dan Bali.	<p>Prioritas Pulau</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan bentuk-bentuk kegiatan dan materi pelatihan

ISU STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN	WILAYAH	STRATEGI PENGEMBANGAN	FOKUS PRIORITAS / KEGIATAN PRIORITAS
		<ul style="list-style-type: none"> • DIY • Jawa Timur • Bali 		<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan sarana prasarana pendidikan dan ketrampilan
<p>Terancamnya Fungsi Wilayah Jawa-Bali sebagai salah satu Lumbung Pangan Nasional</p>	<p>Mempertahankan fungsi Jawa-Bali sebagai salah satu lumbung pangan nasional</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Jawa Barat • Jawa Tengah • DIY • Jawa Timur • Bali 	<p>Meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman pangan melalui penyuluhan dan introduksi teknologi di Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, Bali</p>	<p>Prioritas Nasional</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengelolaan produksi tanaman sereal (padi, Jagung) • Pengelolaan produksi tanaman kacang-kacangan dan umbi-umbian (Kedelai) • Penguatan perlindungan tanaman pangan dari gangguan OPT dan DFI • Pengelolaan sistem penyediaan benih tanaman pangan • Pengembangan agribisnis perbenihan, pupuk dan sarana produksi lainnya • Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman semusim • Penelitian dan pengembangan tanaman pangan (Jabar, Jatim) • Penelitian dan pengembangan hortikultura (DKI, Jabar, Jatim) • Penelitian dan pengembangan bioteknologi dan sumber daya genetik pertanian (Jabar) • Pelaksanaan Penelitian dan Pengkajian Teknologi Pertanian (DKI, Jabar, Jateng, DIY, Jatim, Bali, Banten) • Penyaluran subsidi benih tanaman pangan • Penyaluran pupuk bersubsidi • Pelaksanaan penelitian dan pengembangan

ISU STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN	WILAYAH	STRATEGI PENGEMBANGAN	FOKUS PRIORITAS / KEGIATAN PRIORITAS
				<p>Sumberdaya Lahan Pertanian (DKI, Jabar, Jateng, DIY, Jatim, Bali, Banten)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pemantapan sistem penyuluhan pertanian <p>Prioritas Pulau</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penyiapan SDM dan kelembagaan petani
		<ul style="list-style-type: none"> • Jawa Barat • Jawa Timur 	Mengendalikan konversi lahan sawah dengan memperhatikan kebijakan tata ruang (RTRW) dan penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Provinsi Jawa Barat, Jawa Timur.	<p>Prioritas Nasional</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penataan regulasi untuk menjamin kepastian hukum atas lahan pertanian • Penyusunan Rencana Zonasi <p>Prioritas Pulau</p> <ul style="list-style-type: none"> • Inventarisasi dan penetapan kawasan lahan pangan berkelanjutan dalam RTRW
		<ul style="list-style-type: none"> • Jawa Barat 	Mengembangkan peternakan domba dan kerbau di Provinsi Jawa Barat	<p>Prioritas Nasional</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penelitian dan Pengembangan Peternakan dan Veteriner (Jabar, Jatim) • Pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan menular strategis dan penyakit zoonosis <p>Prioritas Pulau</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan investasi dalam pengembangan ternak • Pengembangan ketersediaan pakan • Penyiapan SDM peternak
		<ul style="list-style-type: none"> • Jawa Timur • Bali 	Mengembangkan peternakan sapi perah dan sapi potong di Provinsi Jawa Timur dan Bali.	<p>Prioritas Nasional</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penelitian dan Pengembangan Peternakan dan Veteriner (Jabar, Jatim) • Peningkatan produksi ternak ruminansia dengan

ISU STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN	WILAYAH	STRATEGI PENGEMBANGAN	FOKUS PRIORITAS / KEGIATAN PRIORITAS
				pendayagunaan sumber daya lokal (sapi) <ul style="list-style-type: none"> • Pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan menular strategis dan penyakit zoonosis Prioritas Pulau <ul style="list-style-type: none"> • Penyiapan SDM peternak
		<ul style="list-style-type: none"> • Jawa Barat • Jawa Tengah 	Mengembangkan peternakan kambing di Provinsi Jawa Barat dan Jawa Tengah.	Prioritas Nasional <ul style="list-style-type: none"> • Penelitian dan Pengembangan Peternakan dan Veteriner (Jabar, Jatim) • Pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan menular strategis dan penyakit zoonosis Prioritas Pulau <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan investasi dalam pengembangan ternak • Pengembangan ketersediaan pakan • Penyiapan SDM peternak
		<ul style="list-style-type: none"> • Jawa Timur • Jawa Barat • Jawa Tengah 	Mengembangkan ternak kecil ayam kampung, ayam petelur, dan ayam pedaging di Provinsi Jawa Timur, Jawa Barat, dan Jawa Tengah.	Prioritas Nasional <ul style="list-style-type: none"> • Penelitian dan Pengembangan Peternakan dan Veteriner (Jabar, Jatim) • Peningkatan produksi ternak non ruminansia dengan pendayagunaan sumber daya lokal (telur) • Pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan menular strategis dan penyakit zoonosis Prioritas Pulau <ul style="list-style-type: none"> • Penyiapan SDM peternak

ISU STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN	WILAYAH	STRATEGI PENGEMBANGAN	FOKUS PRIORITAS / KEGIATAN PRIORITAS
		<ul style="list-style-type: none"> • DKI Jakarta • Jawa Timur • Jawa Barat • Jawa Tengah 	Mengembangkan perikanan tangkap di Provinsi Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah dan DKI.	<p>Prioritas Nasional</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan Kapal perikanan Indonesia (yang laik laut laik tangkap dan laik simpan) alat penangkap ikan (yang sesuai SNI) dan pengawakan yang memenuhi standar di setiap WPP. • Penelitian dan pengembangan IPTEK perikanan tangkap. • Pengelolaan Sumberdaya Ikan (Jabar, Jateng, Jatim). <p>Prioritas Pulau</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan investasi dalam pengembangan aktivitas perikanan tangkap. • Pengembangan pelabuhan perikanan, ketersediaan energi, dan TPI. • Penyiapan SDM perikanan tangkap • Pengendalian over eksploitasi perikanan tangkap.
		<ul style="list-style-type: none"> • Jawa Barat 	Mengembangkan perikanan kolam (air tawar) di Provinsi Jawa Barat	<p>Prioritas Nasional</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan teknik budidaya ikan (Jabar, Jakarta, Bali). • Pemenuhan kebutuhan benih untuk produksi dan pasar (patin, nila, lele, gurame, mas, rumput laut). <p>Prioritas Pulau</p>

ISU STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN	WILAYAH	STRATEGI PENGEMBANGAN	FOKUS PRIORITAS / KEGIATAN PRIORITAS
				<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan investasi dalam pengembangan perikanan kolam/air tawar. • Pengembangan ketersediaan pakan, dan obat-obatan. • Penyiapan SDM perikanan air tawar.
		<ul style="list-style-type: none"> • Jawa Timur 	Mengembangkan perikanan tambak di Provinsi Jawa Timur	<p>Prioritas Nasional</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan teknik budidaya ikan (Jabar, Jakarta, Bali). <p>Prioritas Pulau</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan investasi dalam pengembangan perikanan tambak. • Pengembangan ketersediaan benih, pakan, dan obat-obatan. • Penyiapan SDM perikanan tambak.
		<ul style="list-style-type: none"> • Jawa Barat • Jawa Tengah • DIY • Jawa Timur • Bali 	Meningkatkan luas pengusahaan lahan petani dan menurunkan ketimpangan penguasaan lahan di Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, Bali.	<p>Prioritas Nasional</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penataan regulasi untuk menjamin kepastian hukum atas lahan pertanian. <p>Prioritas Pulau</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan skala ekonomi melalui konsolidasi lahan.
		<ul style="list-style-type: none"> • Jawa Barat • Banten • DIY • Jawa Timur 	Mengembangkan sistem insentif dan disinsentif untuk mengurangi luasan lahan tidur dan lahan terlantar di Provinsi Jawa Barat, Banten, DIY, dan Jawa Timur.	<p>Prioritas Nasional</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penertiban, serta optimalisasi penggunaan lahan terlantar.
		<ul style="list-style-type: none"> • Jawa Tengah • Jawa Timur 	Mendorong transformasi angkatan kerja pertanian ke non pertanian melalui peningkatan kualitas angkatan kerja di	<p>Prioritas Nasional</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan investasi pangan, pertanian, dan industri perdesaan berbasis produk lokal oleh pelaku usaha dan

ISU STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN	WILAYAH	STRATEGI PENGEMBANGAN	FOKUS PRIORITAS / KEGIATAN PRIORITAS
		<ul style="list-style-type: none"> • Bali 	Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali	<p>pemerintah.</p> <p>Prioritas Pulau</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan investasi di kegiatan UMKM yang mampu menyerap tenaga kerja. • Penyiapan SDM untuk pengembangan UMKM. • Penyiapan SDM terampil untuk mengisi kesempatan kerja di bidang industri pengolahan dan jasa.
		<ul style="list-style-type: none"> • Jawa Barat • Jawa Tengah • DIY • Jawa Timur • Bali 	Membangun infrastruktur irigasi dan rehabilitasi daerah resapan air di kawasan-kawasan budidaya pertanian di Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, Bali.	<p>Prioritas Nasional</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan / peningkatan Jaringan Irigasi. • Rehabilitasi Jaringan Irigasi. • Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi. • Pembangunan / peningkatan Jaringan Rawa. • Rehabilitasi Jaringan Rawa. • Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Rawa. • Pembangunan / peningkatan Jaringan Irigasi Air Tanah. • Rehabilitasi Jaringan Irigasi Air Tanah. • Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Air Tanah. • Pengelolaan air untuk pertanian. • Peningkatan/Rehabilitasi jaringan irigasi dan O & P Jaringan Irigasi.
Tingginya kepadatan dan konsentrasi penduduk di wilayah metropolitan Jabodetabek dan Sekitarnya	Pengembangan pola distribusi penduduk di wilayah Jawa Bali secara lebih seimbang	<ul style="list-style-type: none"> • Jawa Barat • Banten 	Mengendalikan laju pertumbuhan jumlah penduduk di Provinsi Jawa Barat dan Banten	<p>Prioritas Nasional</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengelolaan Informasi Manajemen Kependudukan. <p>Prioritas Pulau</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mengembangkan regulasi untuk mengendalikan arus migrasi masuk di Provinsi Jawa Barat, Banten.

ISU STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN	WILAYAH	STRATEGI PENGEMBANGAN	FOKUS PRIORITAS / KEGIATAN PRIORITAS
		<ul style="list-style-type: none"> • DKI • Jawa Barat • Banten • Jawa Tengah • DIY • Jawa Timur • Bali 	Mengembangkan pengelolaan program transmigrasi yang profesional, dan mampu mendorong tenaga-tenaga trampil untuk bekerja di luar Jawa.	Prioritas Pulau <ul style="list-style-type: none"> • Penyiapan SDM terampil untuk menjadi transmigran. • Penguatan arah kebijakan transmigrasi sebagai instrumen untuk mendorong perkembangan wilayah. • Mendorong kerjasama dengan provinsi-provinsi luar Jawa dalam pengembangan program transmigrasi.
		<ul style="list-style-type: none"> • Jawa Barat • Jawa Tengah • Jawa Timur • Bali 	Mengembangkan kota-kota kecil dan menengah.	Prioritas Pulau <ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan insentif investasi di kota-kota kecil dan menengah. • Pengembangan prasarana dan sarana dasar perkotaan.
Tingginya Tingkat Pengangguran di Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi.	Pengurangan Tingkat Pengangguran di Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi.	<ul style="list-style-type: none"> • Jawa Barat • Banten 	Pengembangan aktivitas ekonomi padat karya yang mampu mendorong penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jawa Barat dan Banten.	Prioritas Pulau <ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan industri untuk mendorong penyerapan tenaga kerja mencakup agroindustri dan industri tekstil. • Penyiapan SDM untuk mengisis kesempatan kerja agroindustri dan industri tekstil.
		<ul style="list-style-type: none"> • DKI 	Peningkatan kemampuan wirausaha SDM angkatan kerja di Provinsi DKI Jakarta.	Prioritas Pulau <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan akses kredit perbankan untuk pengembangan UMKM di Provinsi DKI Jakarta. • Mengembangkan pelatihan kewirausahaan dan ketrampilan bagi lulusan-lulusan SLTA.
		<ul style="list-style-type: none"> • Jawa Timur • Jawa Tengah • DIY 	Pengendalian migrasi tenaga kerja tanpa ketrampilan ke kota-kota besar dan metropolitan.	Prioritas Pulau <ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan UMKM di perdesaan, kota kecil dan menengah.

ISU STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN	WILAYAH	STRATEGI PENGEMBANGAN	FOKUS PRIORITAS / KEGIATAN PRIORITAS
		<ul style="list-style-type: none"> • Jawa Barat 		<ul style="list-style-type: none"> • optimalisasi balai latihan kerja
Tingginya Tingkat Kemiskinan Perdesaan di Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jatim, dan Tingkat Kemiskinan Perkotaan di DIY	Pengurangan Tingkat Kemiskinan Perdesaan di Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Tingkat Kemiskinan Perkotaan di Provinsi DIY	<ul style="list-style-type: none"> • Jawa Barat • Jawa Tengah • Jawa Timur • DIY 	Meningkatkan akses penduduk miskin terhadap pendidikan di Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DIY.	Prioritas Nasional <ul style="list-style-type: none"> • Pemantapan/ rasionalisasi implementasi BOS. • Penurunan harga buku standar di tingkat sekolah dasar dan menengah.
		<ul style="list-style-type: none"> • Jawa Barat • Jawa Tengah • Jawa Timur • DIY 	Perlindungan terhadap buruh miskin perdesaan di Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan buruh miskin perkotaan di DIY	Prioritas Nasional <ul style="list-style-type: none"> • Integrasi Program Perlindungan Sosial berbasis keluarga (PKH, bantuan pangan, jamkesmas, beasiswa anak keluarga berpendapatan rendah, PAUD). Prioritas Pulau <ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan dan pengawasan upah buruh sesuai UMR.
		<ul style="list-style-type: none"> • Jawa Barat • Jawa Tengah • Jawa Timur • DIY 	Menyediakan bantuan modal untuk usaha mikro di Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur.	Prioritas Nasional <ul style="list-style-type: none"> • Penambahan anggaran PNPM Mandiri dari Rp. 10,3 T pada tahun 2009 menjadi Rp. 12,1 T pada tahun 2010*)
Menurunnya Daya Dukung Lingkungan	Pemeliharaan dan pemulihan fungsi kawasan lindung.	<ul style="list-style-type: none"> • Jawa Barat • Jawa Timur • Banten • Jawa Tengah 	Melakukan rehabilitasi dan konservasi hutan di kawasan hutan lindung dan konservasi di Provinsi Jawa Barat dan Jawa Timur.	Prioritas Pulau <ul style="list-style-type: none"> • Penegakan hukum terhadap kejadian pelanggaran pemanfaatan ruang di kawasan hutan konservasi di Provinsi Jawa Barat dan Jawa Timur. • Pengembangan sistem insentif disinsentif untuk mendorong partisipasi stakeholder dalam menjaga kawasan hutan konservasi di Provinsi Jawa Barat dan Jawa Timur. • Peningkatan pengawasan terhadap pelanggaran di pemanfaatan ruang di kawasan hutan konservasi di Provinsi Jawa Barat dan Jawa Timur.

ISU STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN	WILAYAH	STRATEGI PENGEMBANGAN	FOKUS PRIORITAS / KEGIATAN PRIORITAS
		<ul style="list-style-type: none"> • DKI • Jawa Barat • Banten • Jawa Tengah • DIY 	Peningkatan luas RTH hingga 30% di Kota DKI Jakarta, Tangerang, Bekasi, Bandung, Cirebon, Cimahi, Surakarta, dan Yogyakarta	Prioritas Pulau <ul style="list-style-type: none"> • Mengalokasikan RTH di dalam RTRW Kota. • Melakukan pengendalian alih fungsi RTH. • Mengembangkan sistem insentif disinsentif untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam memelihara dan meningkatkan luas RTH.
		<ul style="list-style-type: none"> • Jawa Barat • Banten • Jawa Tengah • DIY • Jawa Timur 	Melakukan rehabilitasi daerah resapan air di Provinsi Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, DIY dan Jawa Timur.	Prioritas Pulau <ul style="list-style-type: none"> • Rehabilitasi hutan di daerah resapan air. • Penegakan hukum terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang di kawasan lindung yang berfungsi sebagai daerah resapan air. • Mengembangkan sistem insentif disinsentif untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam merehabilitasi kawasan lindung yang berfungsi sebagai daerah resapan air.
		<ul style="list-style-type: none"> • Jawa Barat • Banten • Jawa Tengah • DIY • Jawa Timur 	Melakukan rehabilitasi di lahan-lahan yang rawan longsor di Provinsi Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, DIY dan Jawa Timur.	Prioritas Pulau <ul style="list-style-type: none"> • Penetapan kawasan rawan bencana longsor dalam RTRW. • Pengembangan RTH di lahan-lahan rawan longsor. • Mengembangkan sistem insentif disinsentif untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam merehabilitasi lahan-lahan rawan longsor.
	Pemeliharaan dan pemulihan sumber daya air dan lahan	<ul style="list-style-type: none"> • Jawa Barat • Banten • Jawa Tengah 	Melakukan rehabilitasi dan konservasi hutan di kawasan DAS.	Prioritas Nasional <ul style="list-style-type: none"> • Penghentian kerusakan lingkungan di 13 Daerah Aliran Sungai yang rawan bencana mulai 2010 dan

ISU STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN	WILAYAH	STRATEGI PENGEMBANGAN	FOKUS PRIORITAS / KEGIATAN PRIORITAS
		<ul style="list-style-type: none"> • DIY • Jawa Timur 		seterusnya. <ul style="list-style-type: none"> • Penanganan secara terpadu daerah aliran sungai Bengawan Solo sebelum 2013.
		<ul style="list-style-type: none"> • DKI • Jawa Barat • Jawa Tengah • Jawa Timur 	Melakukan rehabilitasi kawasan sempadan sungai di Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.	Prioritas Pulau <ul style="list-style-type: none"> • Rehabilitasi RTH di kawasan sempadan sungai • Penataan penggunaan lahan di kawasan sempadan sungai • Mengembangkan sistem insentif disinsentif untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam merehabilitasi kawasan sempadan sungai
		<ul style="list-style-type: none"> • DKI • Jawa Barat • Banten • Jawa Tengah • DIY • Jawa Timur 	Melakukan rehabilitasi sungai di Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, DIY, dan Jawa Timur.	Prioritas Pulau <ul style="list-style-type: none"> • Identifikasi tingkat kerusakan sungai • Penentuan langkah-langkah rehabilitasi sungai • Mengembangkan sistem insentif disinsentif untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam merehabilitasi sungai
		<ul style="list-style-type: none"> • Jatim • Jateng • Jabar • DIY • Bali 	Melakukan rehabilitasi lahan kritis di Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, DIY, Bali	Prioritas Pulau <ul style="list-style-type: none"> • Identifikasi lahan kritis. • Pengembangan RTH di lahan-lahan kritis. • Mengembangkan sistem insentif disinsentif untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam merehabilitasi lahan-lahan kritis.
		<ul style="list-style-type: none"> • DKI • Jawa Barat • Banten 	Mengendalikan pemanfaatan air tanah di Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, DIY, Jawa	Prioritas Pulau <ul style="list-style-type: none"> • Identifikasi tingkat ketersediaan air tanah. • Pengembangan regulasi tentang pemanfaatan air tanah.

ISU STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN	WILAYAH	STRATEGI PENGEMBANGAN	FOKUS PRIORITAS / KEGIATAN PRIORITAS
	Penanganan ancaman bencana banjir dan longsor	<ul style="list-style-type: none"> • Jawa Tengah • DIY • Jawa Timur 	Timur.	<ul style="list-style-type: none"> • Pengawasan pemanfaatan air tanah.
		<ul style="list-style-type: none"> • DKI • Banten • Jawa Barat • Jawa Tengah • Jawa Timur 	Meningkatkan kesiapan mitigasi bencana banjir di Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.	<p>Prioritas Nasional</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan pelayanan informasi iklim, agroklimat dan iklim maritim. • Peningkatan pelayanan data dan informasi meteorologi publik serta peringatan dini cuaca ekstrim. • Penyelesaian Banjir Kanal Timur, Peningkatan Kapasitas Banjir Kanal Barat dan Normalisasi Sungai Cisadane Hilir, Bekasi Hilir, Sunter, Cipinang, Cakung, Buaran, Jatikramat, Sabi, Dadap, Mookervart, dan Angke Hulu. • Pengendalian banjir di kota Bandung, Surabaya, Semarang. <p>Prioritas Pulau</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penyiapan sarana medis, dan transportasi untuk evakuasi korban bencana. • Pengembangan prosedur mitigasi bencana. • Peningkatan kesiapan masyarakat dalam kondisi bencana banjir. • Perencanaan jalur dan lokasi evakuasi bencana.
		<ul style="list-style-type: none"> • Jawa Barat • Banten • Jawa Tengah • DIY 	Meningkatkan kesiapan mitigasi bencana longsor di Provinsi Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, DIY dan Jawa Timur.	<p>Prioritas Nasional</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan pelayanan informasi iklim, agroklimat dan iklim maritim. • Peningkatan pelayanan data dan informasi meteorologi

ISU STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN	WILAYAH	STRATEGI PENGEMBANGAN	FOKUS PRIORITAS / KEGIATAN PRIORITAS
		<ul style="list-style-type: none"> • Jawa Timur 		<p>publik serta peringatan dini cuaca ekstrim.</p> <p>Prioritas Pulau</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penyiapan sarana medis, dan transportasi untuk evakuasi korban bencana. • Pengembangan prosedur mitigasi bencana. • Peningkatan kesiapan masyarakat dalam kondisi bencana banjir. • Perencanaan jalur dan lokasi evakuasi bencana.
Tingginya Kasus tindak Pidana Korupsi	Peningkatan pemberantasan korupsi akibat kompleksitas birokrasi, proses perijinan, dan lemahnya penegakan hukum	<ul style="list-style-type: none"> • DKI • Jawa Barat • Banten 	Melakukan reformasi birokrasi sehingga pelayanan menjadi lebih efektif, dan efisien di Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten.	<p>Prioritas Nasional</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pendidikan dan pelatihan Bidang Pemerintahan dan Politik. • Pengembangan Kapasitas dan Evaluasi Kinerja Daerah. <p>Prioritas Pulau</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penyederhanaan kompleksitas birokrasi.
		<ul style="list-style-type: none"> • DKI • Banten • Jawa Barat • Jawa Timur 	Mengembangkan sistem pengurusan perijinan di Provinsi DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, dan Jawa Timur yang transparan dan akuntabel	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kapasitas SDM aparatur. • Pengembangan sistem informasi pengurusan perijinan. • Pengembangan pengurusan perijinan satu atap.
		<ul style="list-style-type: none"> • DKI • Jawa Barat • Jawa Tengah • Jawa Timur • Bali 	Meningkatkan kredibilitas lembaga hukum di Jakarta, Bandung, Cirebon, Purwokerto, Surabaya dan Denpasar	<p>Prioritas Nasional</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan integrasi dan integritas penerapan dan penegakan hukum oleh seluruh lembaga dan aparat hukum.
Tingginya ancaman terorisme terhadap obyek vital	Meminimalkan ancaman terorisme	<ul style="list-style-type: none"> • DKI • Bali 	Meningkatkan kemampuan aparat untuk mencegah aksi-aksi terorisme di	<p>Prioritas Pulau</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan sarana prasarana pertahanan dan

ISU STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN	WILAYAH	STRATEGI PENGEMBANGAN	FOKUS PRIORITAS / KEGIATAN PRIORITAS
			Provinsi DKI Jakarta dan Bali	keamanan untuk menangkal bahaya terorisme di Provinsi DKI Jakarta, Bali. <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kapasitas SDM aparaturnya pertahanan dan keamanan dalam menghadapi ancaman aksi terorisme di Provinsi DKI Jakarta, Bali.
		<ul style="list-style-type: none"> • DKI • Jawa Barat • Banten • Jawa Tengah • DIY • Jawa Timur • Bali 	Meningkatkan kapasitas dan pemahaman masyarakat terhadap bahaya munculnya gerakan radikal yang dapat memicu aksi terorisme.	Prioritas Pulau <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan sosialisasi kepada masyarakat tentang bahaya terorisme. • Meningkatkan peran serta tokoh-tokoh agama dan tokoh masyarakat untuk mencegah gerakan terorisme.
Rendahnya Kapasitas dan Daya Saing SDM dalam Menghadapi Persaingan Global	Pengembangan kapasitas SDM sejalan dengan transformasi ekonomi ke arah sektor sekunder (industri pengolahan) dan tersier (jasa)	<ul style="list-style-type: none"> • Jawa Barat • Banten • Jawa Tengah • Jawa Timur • Bali 	Pengembangan pendidikan kejuruan dan ketrampilan baik formal maupun non formal di Provinsi Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali.	Prioritas Pulau <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan fasilitas pendidikan dan ketrampilan kerja. • Penyediaan bentuk dan materi pengajaran dan pelatihan ketrampilan. • Peningkatan kerjasama lembaga pendidikan dan dunia usaha.
	Peningkatan IPM di Provinsi Banten, Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Bali terutama dari komponen AHH dan RLS.	<ul style="list-style-type: none"> • Jawa Barat • Jawa Timur • Banten 	Meningkatkan akses masyarakat terhadap infrastruktur kesehatan di Provinsi Jawa Barat, Jawa Timur dan Banten.	Prioritas Nasional <ul style="list-style-type: none"> • Perluasan Asuransi Kesehatan Nasional melalui : i) Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin di Puskesmas; ii) Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin di Rumah Sakit; iii) Dukungan Manajemen Pengelolaan, Pembinaan, dan Pengembangan Jaminan Kesehatan. • Pemberlakuan Daftar Obat Esensial Nasional (DOEN)

ISU STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN	WILAYAH	STRATEGI PENGEMBANGAN	FOKUS PRIORITAS / KEGIATAN PRIORITAS
				sebagai dasar pengadaan obat di seluruh Indonesia dan pembatasan harga obat generik bermerek pada tahun 2010.
		<ul style="list-style-type: none"> • Jawa Barat • Banten • Jawa Tengah • Jawa Timur • Bali 	Meningkatkan akses masyarakat terhadap infrastruktur pendidikan di Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Bali.	Prioritas Nasional <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan Akses Pendidikan Dasar-Menengah • Pemantapan/ rasionalisasi implementasi BOS • Penurunan harga buku standar di tingkat sekolah dasar dan menengah • Peningkatan perbandingan guru:murid
		<ul style="list-style-type: none"> • DKI • Jawa Barat • Banten • Jawa Tengah • DIY • Jawa Timur • Bali 	Mengendalikan dan mencegah penyebaran berbagai penyakit menular di Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, Bali.	Prioritas Nasional <ul style="list-style-type: none"> • Pengendalian Penyakit Menular. • Peningkatan kualitas layanan rumah sakit berakreditasi internasional. Prioritas Pulau <ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan penelitian kedokteran untuk mengatasi penyakit menular . • Melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar penyebaran penyakit menular bisa dicegah sedini mungkin.
Besarnya dampak bencana alam terhadap kehidupan dan aktivitas sosial ekonomi masyarakat	Minimalisasi dampak kerugian akibat kejadian bencana alam	<ul style="list-style-type: none"> • DKI • Jawa Barat • Banten • Jawa Tengah • DIY • Jawa Timur • Bali 	Mengendalikan perkembangan permukiman di kawasan-kawasan rawan bencana di Provinsi DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, DIY, Jateng, Jatim dan Bali.	Prioritas Pulau <ul style="list-style-type: none"> • Menetapkan kawasan rencana bencana di dalam dokumen RTRW Provinsi atau RTRW Kab/Kota. • Menetapkan arahan pengembangan kawasan permukiman yang dapat mencegah perkembangan permukiman di kawasan rawan bencana. • Pengendalian perkembangan permukiman di kawasan-

ISU STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN	WILAYAH	STRATEGI PENGEMBANGAN	FOKUS PRIORITAS / KEGIATAN PRIORITAS
				kawasan rawan bencana.
		<ul style="list-style-type: none"> • DKI • Jawa Barat • Banten • Jawa Tengah • DIY • Jawa Timur • Bali 	Mengembangkan infrastruktur dan bangunan yang mampu menahan dampak bencana di Provinsi DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, DIY, Jateng, Jatim dan Bali.	<p>Prioritas Pulau</p> <ul style="list-style-type: none"> • Membangun infrastruktur dan bangunan tahan gempa untuk permukiman di kawasan rawan gempa. • Membangun infrastruktur penahan air pasang untuk permukiman di kawasan rawan banjir akibat air pasang. • Mengembangkan teknologi konstruksi infrastruktur dan bangunan tahan gempa. • Pengawasan kualitas dan struktur bangunan.
		<ul style="list-style-type: none"> • DKI • Jawa Barat • Banten • Jawa Tengah • DIY • Jawa Timur • Bali 	Mengembangkan kesiapan mitigasi bencana dan sistem deteksi dini di kawasan-kawasan rawan bencana di Provinsi DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, DIY, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Bali	<p>Prioritas Nasional</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kesenambungan sistem pengamatan dan analisa data di bidang gempa bumi dan tsunami. • Peningkatan pelayanan data dan informasi meteorologi publik serta peringatan dini cuaca ekstrim. <p>Prioritas Pulau</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya RDTR yang telah mempertimbangkan mitigasi bencana. • Pembangunan infrastruktur untuk mitigasi bencana. • Sosialisasi prosedur mitigasi bencana.



BAB IV

PENGEMBANGAN WILAYAH KALIMANTAN TAHUN 2010-2014

4.1 Kondisi Wilayah Kalimantan Saat Ini

4.1.1 Capaian Pembangunan Wilayah

Pertumbuhan ekonomi di wilayah Kalimantan dalam kurun waktu 2004—2008 menunjukkan pola yang berbeda antarprovinsi. Namun secara umum (rata-rata), pertumbuhan ekonomi cenderung meningkat. Pada tahun 2004, rata-rata pertumbuhan ekonomi di wilayah Kalimantan sebesar 3,1 persen dan pada tahun 2008 meningkat menjadi sebesar 5,2 persen. Pertumbuhan ekonomi tertinggi di Provinsi Kalimantan Tengah, sedangkan pertumbuhan ekonomi terendah di Provinsi Kalimantan Timur. **(Tabel 4.1).**

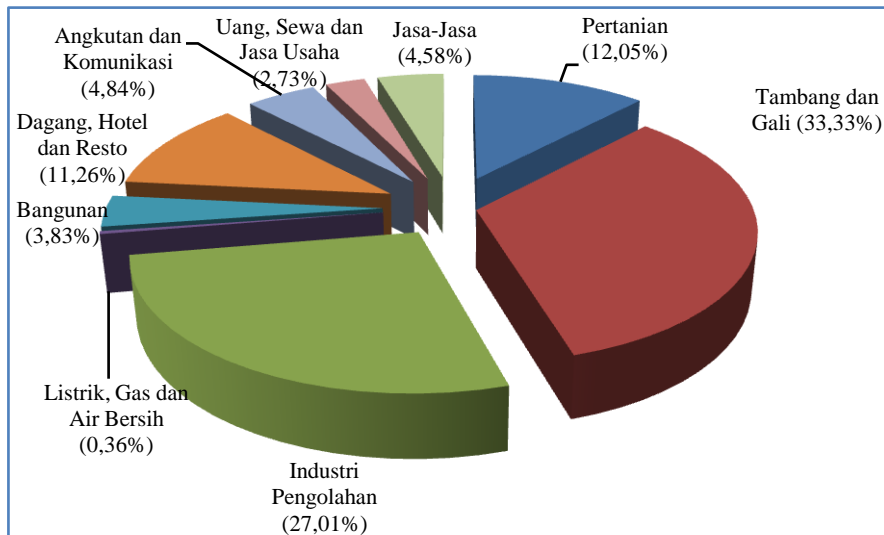
TABEL 4.1
PERTUMBUHAN EKONOMI WILAYAH KALIMANTAN TAHUN 2004 – 2008
ATAS DASAR HARGA KONSTAN TAHUN 2000 (DALAM PERSEN)

Provinsi	2004	2005	2006	2007	2008
Kalimantan Barat	4,8	4,7	5,2	6,0	5,4
Kalimantan Tengah	5,6	5,9	5,8	6,1	6,2
Kalimantan Selatan	5,6	5,1	5,0	6,0	6,1
Kalimantan Timur	1,8	3,2	2,8	1,9	4,8

Sumber : Badan Pusat Statistik

Pada triwulan 1 tahun 2008, sektor yang memberikan kontribusi terbesar bagi perekonomian di wilayah Kalimantan adalah sektor pertambangan dan penggalian, sektor industri pengolahan, sektor pertanian, sektor perdagangan, hotel, dan restoran. Sektor pertambangan dan penggalian memberikan kontribusi cukup besar, yaitu sebesar 33,3 persen terhadap sektor pertambangan nasional. Sektor pertambangan di wilayah Kalimantan terpusat di Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan, sedangkan sektor pertanian terpusat di Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Gambaran kontribusi sektoral wilayah Kalimantan atas dasar harga berlaku triwulan 1 tahun 2008 dapat dilihat pada Gambar 4.1.

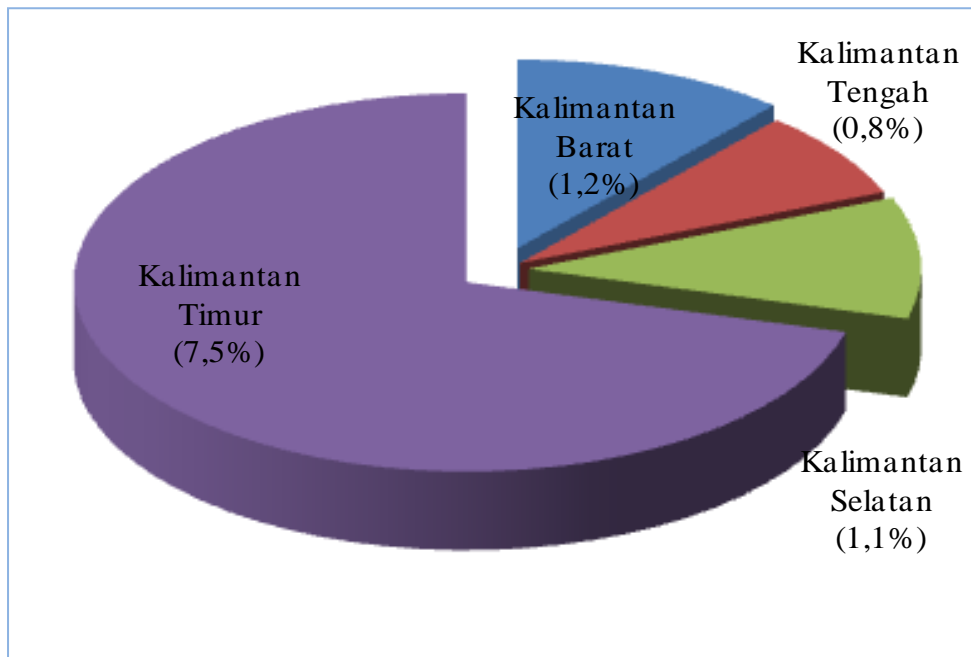
GAMBAR 4.1
KONTRIBUSI EKONOMI WILAYAH KALIMANTAN MENURUT SEKTOR
ATAS DASAR HARGA BERLAKU TRIWULAN I TAHUN 2008



Sumber : Badan Pusat Statistik (diolah)

Kontribusi perekonomian wilayah Kalimantan terhadap pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB) nasional tahun 2008 adalah 10,5 persen. Kontribusi perekonomian provinsi terhadap perekonomian nasional terbesar adalah Provinsi Kalimantan Timur, sedangkan kontribusi provinsi lain rata-rata sebesar 1 persen terhadap perekonomian nasional (**Gambar 4.2**).

GAMBAR 4.2
KONTRIBUSI EKONOMI WILAYAH KALIMANTAN TERHADAP EKONOMI NASIONAL
ATAS DASAR HARGA BERLAKU TAHUN 2008



Sumber : Badan Pusat Statistik (diolah)

Wilayah Kalimantan memiliki potensi sumber daya alam yang cukup besar yang meliputi pertambangan, kehutanan, pertanian dan perkebunan, serta perikanan dan kelautan. Wilayah Kalimantan memiliki komoditas unggulan yang berdaya saing tinggi, baik di pasar domestik maupun pasar luar negeri. Komoditas unggulan di wilayah Kalimantan diantaranya adalah (1) minyak dan gas bumi yang terpusat di Provinsi Kalimantan Timur, (2) kelapa sawit yang terpusat di Provinsi Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah, (3) karet yang terpusat di Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan, dan (4) perikanan dan kelautan, dengan perikanan tangkap dan budi daya laut yang terpusat di Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan.

Investasi swasta dalam bentuk Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) di wilayah Kalimantan masih relatif kecil. Rendahnya investasi berimplikasi terhadap kinerja perekonomian daerah. Nilai realisasi PMA pada tahun 2004 di wilayah Kalimantan sebesar 8 persen dari total investasi nasional kemudian turun menjadi hanya sebesar 0,77 persen dari total investasi nasional di tahun 2008. Realisasi PMA di wilayah Kalimantan berfluktuasi dari tahun ke tahun dengan kontribusi secara nasional cenderung menurun. Sementara itu, untuk realisasi PMDN di wilayah Kalimantan selama periode 2004—2008, kontribusi secara nasional

juga menurun dari 33,37 persen pada tahun 2004 menjadi 8,94 persen pada tahun 2008. Pada tahun 2008, provinsi dengan nilai realisasi PMA terbesar di wilayah Kalimantan adalah Provinsi Kalimantan Tengah dan yang terkecil adalah Provinsi Kalimantan Selatan. Sementara itu, pada tahun yang sama Provinsi Kalimantan Tengah adalah provinsi dengan nilai realisasi PMDN terbesar sewilayah Kalimantan dan Provinsi Kalimantan Barat memiliki nilai realisasi PMDN yang terkecil.

Dalam kurun lima tahun terakhir, PDRB per kapita wilayah Kalimantan terus meningkat. Namun, perbandingan antarprovinsi menunjukkan adanya ketimpangan yang cukup tinggi. Ketimpangan PDRB per kapita terjadi antara Provinsi Kalimantan Timur dan provinsi lain di wilayah Kalimantan (**Tabel 4.2**).

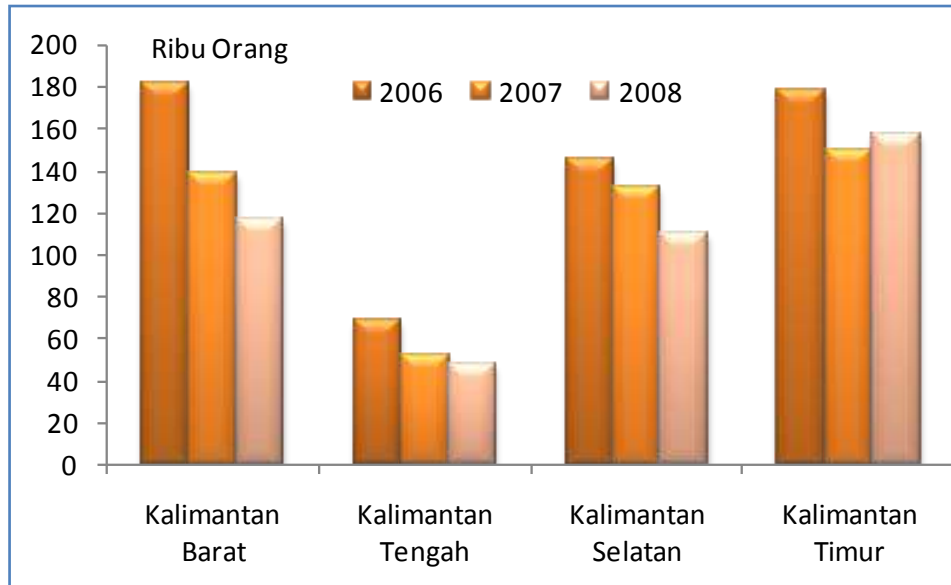
TABEL 4.2
PDRB PER KAPITA DENGAN MIGAS WILAYAH KALIMANTAN
TAHUN 2004—2008 ATAS DASAR HARGA KONSTAN TAHUN 2000
(DALAM RIBU RUPIAH)

Provinsi	2004	2005	2006	2007	2008
Kalimantan Barat	5.574	5.830	6.030	6.285	6.515
Kalimantan Tengah	7.085	7.125	7.431	7.767	8.130
Kalimantan Selatan	6.871	7.066	7.307	7.632	7.990
Kalimantan Timur	32.922	32.537	32.689	32.334	33.337

Sumber : Badan Pusat Statistik

Jumlah pengangguran terbuka tertinggi di wilayah Kalimantan adalah Provinsi Kalimantan Timur sebesar 157 ribu jiwa, sedangkan pengangguran terendah berada di Provinsi Kalimantan Tengah sebanyak 47 ribu jiwa (**Gambar 4.3**).

GAMBAR 4.3
JUMLAH PENGANGGURAN WILAYAH KALIMANTAN TAHUN 2006—2008



Sumber : Badan Pusat Statistik (diolah)

Persentase kemiskinan di wilayah Kalimantan masih relatif tinggi, tetapi dilihat dari jumlah dan persentasenya di setiap provinsi menurun dari tahun 2007 hingga tahun 2009 (**Tabel 4.3**). Berdasarkan data BPS tahun 2009, gambaran persentase kemiskinan di seluruh provinsi di wilayah Kalimantan menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan terbesar berada di Provinsi Kalimantan Barat, yaitu sebesar 9,3 persen, diikuti oleh Provinsi Kalimantan Timur sebesar 7,7 persen, Provinsi Kalimantan Tengah sebesar 7,0 persen, dan terkecil di Provinsi Kalimantan Selatan sebesar 5,1 persen. Isu kemiskinan berkaitan dengan (1) rendahnya ketersediaan dan ketahanan pangan, terutama di daerah pegunungan, daerah pedalaman, daerah yang terkena bencana alam, dan daerah rawan pangan; (2) meningkatnya harga barang kebutuhan pokok selain beras seperti kedelai, minyak tanah, minyak goreng dan terigu; dan (3) tingginya biaya transportasi sebagai akibat rusaknya infrastruktur transportasi dan adanya kendala yang bersifat alami dan musiman seperti gelombang laut yang tinggi.

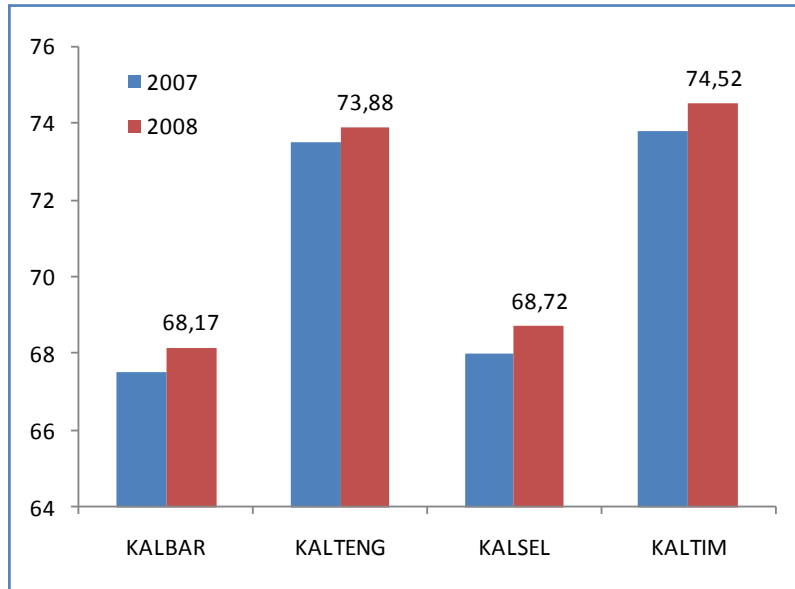
TABEL 4.3
PERSENTASE KEMISKINAN WILAYAH KALIMANTAN
TAHUN 2007—2009

Provinsi	2007	2008	2009
Kalimantan Barat	12,9	11,1	9,3
Kalimantan Tengah	9,4	8,7	7,0
Kalimantan Selatan	7,0	6,5	5,1
Kalimantan Timur	11,0	9,5	7,7

Sumber : Badan Pusat Statistik

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) setiap provinsi di wilayah Kalimantan pada tahun 2007—2008 meningkat. Dari empat provinsi yang ada di wilayah Kalimantan, hanya dua provinsi yang memiliki nilai IPM lebih tinggi dari pada nilai IPM nasional, yaitu Provinsi Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur. Meskipun nilai IPM meningkat dari tahun 2007 ke tahun 2008, peringkat IPM provinsi secara nasional tidak berubah, yaitu Provinsi Kalimantan Barat berada pada peringkat 29, Kalimantan Tengah peringkat 7, Kalimantan Selatan peringkat 26, dan Kalimantan Timur peringkat 5. Salah satu hambatan peningkatan mutu sumber daya manusia di wilayah Kalimantan, khususnya di Provinsi Kalimantan Barat dan Kalimantan Selatan terutama di daerah perdesaan dan pedalaman, adalah terbatasnya tenaga pendidik dan tenaga kesehatan yang berkualitas, belum meratanya penyebaran tenaga pendidik dan tenaga kesehatan, dan terbatasnya prasarana dan sarana transportasi.

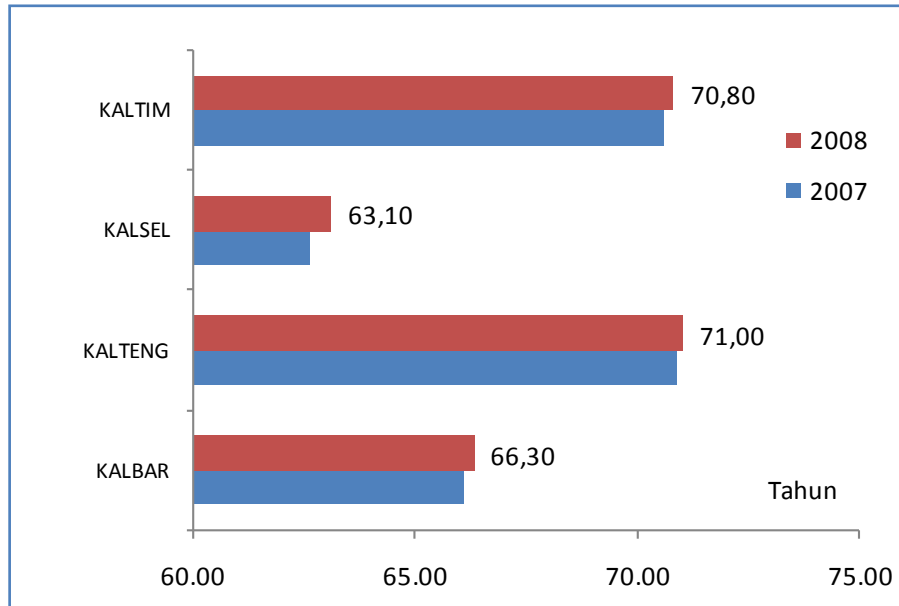
GAMBAR 4.4
INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA WILAYAH KALIMANTAN
TAHUN 2007—2008



Sumber : Badan Pusat Statistik (diolah)

Permasalahan utama dalam bidang kesehatan di wilayah Kalimantan, antara lain, adalah terbatasnya akses layanan kesehatan, khususnya keluarga miskin di daerah-daerah yang memiliki karakteristik geografis yang sulit, serta adanya berbagai penyakit menular. Selain itu, permasalahan kesehatan berkaitan dengan rendahnya pemenuhan gizi terutama ibu, bayi, dan balita dari keluarga miskin, serta rendahnya kesadaran perilaku hidup bersih dan sehat. Umur harapan hidup per provinsi di wilayah Kalimantan menunjukkan adanya kesenjangan umur harapan hidup antarprovinsi. Umur Harapan Hidup (UHH) tertinggi terdapat di Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah, sedangkan UHH terendah terdapat di Provinsi Kalimantan Selatan. Perkembangan umur harapan hidup antarprovinsi di wilayah Kalimantan dapat dilihat pada Gambar 4.5 sebagai berikut.

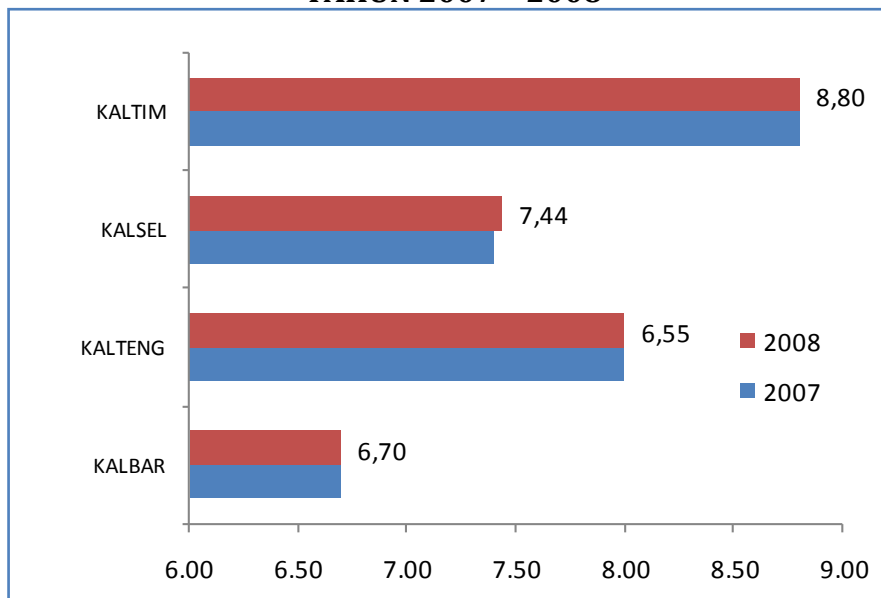
GAMBAR 4.5
UMUR HARAPAN HIDUP WILAYAH KALIMANTAN
TAHUN 2007—2008



Sumber : Badan Pusat Statistik (diolah)

Dalam bidang pendidikan, perkembangan angka rata-rata lama sekolah di beberapa provinsi di wilayah Kalimantan pada tahun 2007—2008 menunjukkan kesenjangan antarprovinsi. Angka rata-rata lama sekolah tertinggi berada di Provinsi Kalimantan Timur, sedangkan angka terendah terdapat di Provinsi Kalimantan Barat. Rendahnya kualitas sumber daya manusia di wilayah Kalimantan, khususnya di Provinsi Kalimantan Barat dan Kalimantan Selatan, disebabkan oleh belum meratanya jangkauan pelayanan dasar pendidikan dan rendahnya mutu pelayanan pendidikan di daerah perdesaan dan pedalaman. Perkembangan rata-rata lama sekolah di wilayah Kalimantan dapat dilihat pada Gambar 4.6 sebagai berikut.

GAMBAR 4.6
RATA-RATA LAMA SEKOLAH WILAYAH KALIMANTAN
TAHUN 2007—2008

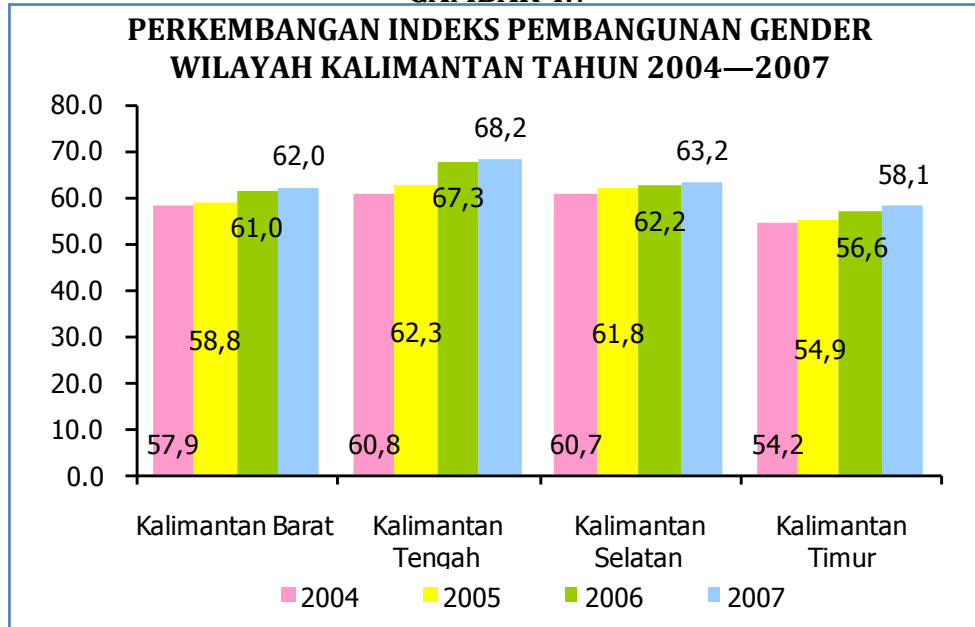


Sumber : Badan Pusat Statistik (diolah)

Kondisi infrastruktur wilayah Kalimantan, baik jumlah maupun mutu, termasuk yang paling rendah di Indonesia. Hal ini ditunjukkan oleh rasio panjang jalan terhadap luas wilayah di wilayah Kalimantan ($0,06 \text{ km/km}^2$) lebih kecil dari pada rata-rata wilayah lainnya di kawasan timur Indonesia ($0,16 \text{ km/km}^2$), dan rasio secara nasional yang mencapai $0,18 \text{ km/km}^2$. Pada tahun 2006 panjang jalan di wilayah Kalimantan adalah 31.948 km dengan rata-rata perkembangan jalan per tahun sebesar 4,69 persen. Nilai tersebut masih sangat rendah jika dibandingkan dengan perkembangan jalan di tingkat nasional yang mencapai 7,25 persen per tahun. Ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan darat yang memadai penting untuk mendorong pembangunan ekonomi daerah dan memudahkan mobilitas penduduk dan lalu lintas/aliran barang dari satu wilayah ke wilayah lain.

Demikian juga dengan Indeks Pembangunan Gender (IPG) (*Gender-related Development Index/GDI*) Indonesia dihitung berdasarkan variabel yang sama dengan IPM menurut jenis kelamin. Di wilayah Kalimantan, IPG setiap provinsi meningkat pada tahun 2007. Peringkat tertinggi adalah Provinsi Kalimantan Tengah, yakni sebesar 68,2 persen. Sementara itu, nilai IPG di tiga provinsi lainnya masih di bawah rata-rata nasional sebesar 65,8 persen. Nilai terendah berada di Provinsi Kalimantan Timur sebesar 58,1 persen yang disebabkan oleh rendahnya persentase kontribusi dalam pendapatan dan umur harapan hidup (UHH) perempuan. Hal ini menunjukkan masih terjadinya kesenjangan gender antarprovinsi di wilayah Kalimantan.

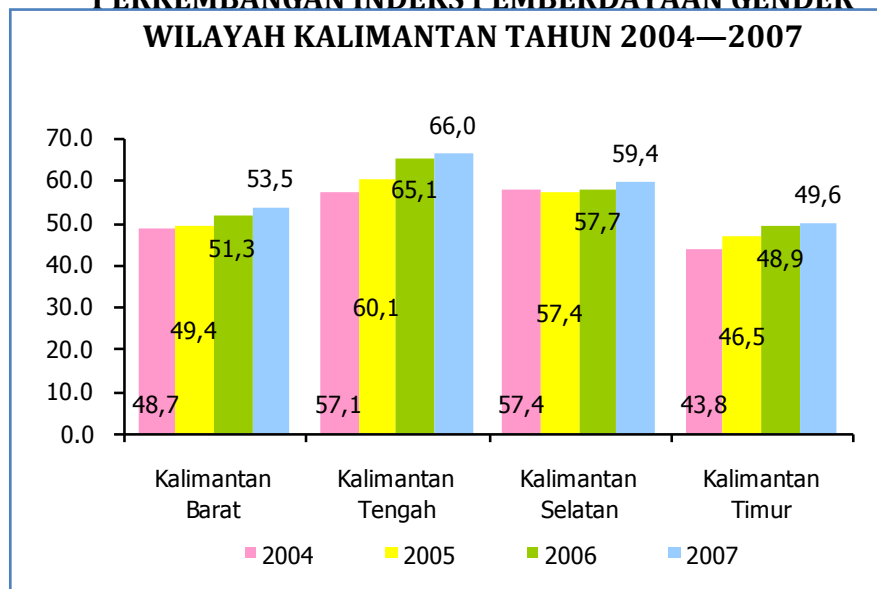
GAMBAR 4.7



Sumber: BPS dan Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan (diolah)

Selain indikator IPG, pembangunan gender juga ditunjukkan dengan indikator *Gender Empowerment Measurement* (GEM) atau Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), yang diukur melalui partisipasi perempuan di bidang ekonomi, politik, dan pengambilan keputusan. Di wilayah Kalimantan, IDG tahun 2007 tiap-tiap provinsi juga meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2006 rata-rata nasional sebesar 62,1. Provinsi Kalimantan Tengah berada di peringkat tertinggi dengan nilai 66,0; sedangkan Kalimantan Timur terendah dengan nilai 49,6. Rendahnya nilai tersebut disebabkan oleh rendahnya keterwakilan perempuan di parlemen, proporsi perempuan dalam pekerjaan profesional, tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK), dan upah nonpertanian perempuan. Di samping itu, upaya perlindungan perempuan dan anak, terutama terhadap berbagai tindak kekerasan, juga perlu ditingkatkan dalam lima tahun mendatang.

GAMBAR 4.8
PERKEMBANGAN INDEKS PEMBERDAYAAN GENDER
WILAYAH KALIMANTAN TAHUN 2004—2007



Sumber: BPS dan Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan (diolah)

Transportasi udara sangat penting bagi wilayah Kalimantan, khususnya untuk angkutan barang dan penumpang antarprovinsi dan antarwilayah. Untuk menunjang kelancaran transportasi udara, provinsi-provinsi di wilayah Kalimantan telah memiliki bandar udara yang cukup memadai. Peran transportasi laut dan sungai juga sangat penting dalam menunjang pergerakan penumpang dan barang di wilayah Kalimantan. Keberadaan transportasi laut dan sungai sangat strategis untuk angkutan barang dan penumpang antarprovinsi, antarwilayah, dan juga untuk menjangkau wilayah yang tidak dapat diakses melalui darat. Wilayah Kalimantan memiliki beberapa pelabuhan utama, yaitu di Banjarmasin, Balikpapan, Samarinda, Lingkas Tarakan, Pontianak, Bontang, dan Sanipan. Sementara itu, transportasi antardaerah dalam satu provinsi menggunakan transportasi sungai dan dalam hal ini juga telah tersedia pelabuhan-pelabuhan angkutan penumpang dan barang yang berkapasitas lebih kecil. Potensi untuk pengembangan transportasi sungai cukup besar. Di wilayah Kalimantan sungai berjumlah sekitar 270, sungai dengan panjang dan lebar yang sangat beragam. Provinsi Kalimantan Timur yang memiliki 160 sungai dengan luas keseluruhan sekitar 240.000 km² merupakan provinsi yang mempunyai sungai yang paling banyak dan paling luas di wilayah Kalimantan. Sungai terpanjang di provinsi ini adalah Sungai Mahakam yang mempunyai lebar 400—800 m dan mempunyai panjang lebih dari 870 km.

Bandar udara di wilayah Kalimantan yang sering digunakan untuk mobilitas angkutan barang dan penumpang adalah Bandar Udara Supadio (Kalimantan Barat), Bandar Udara Syamsudin Noor (Kalimantan Selatan), Bandar Udara Iskandar



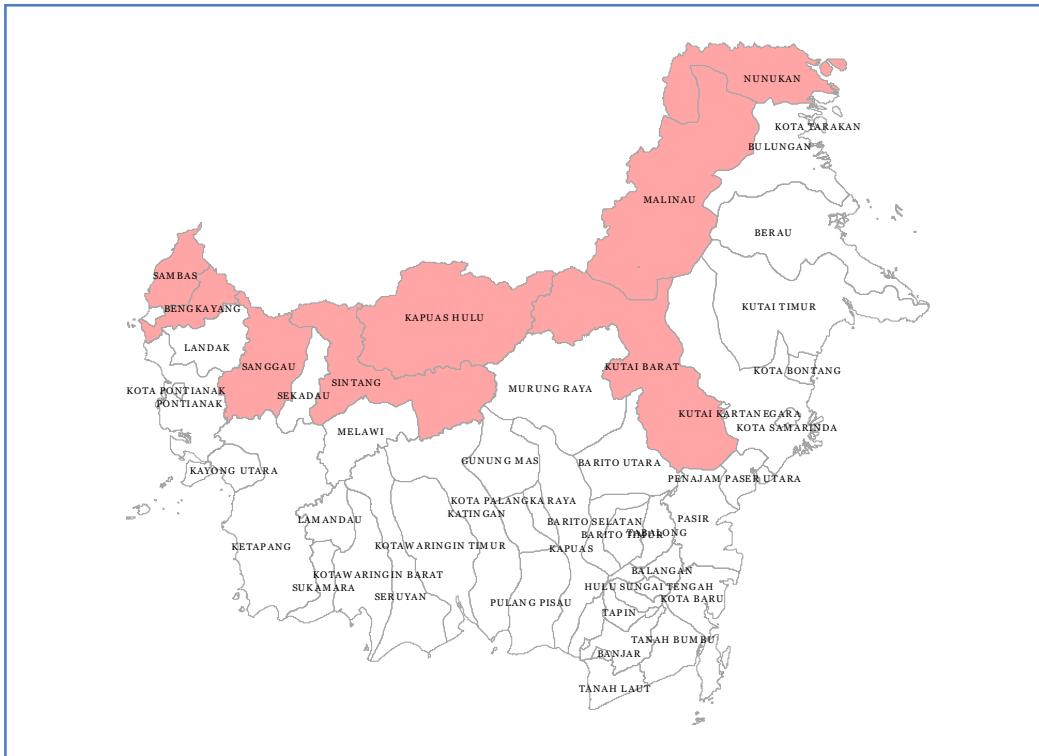
(Kalimantan Tengah), dan Bandar Udara Sepinggian (Kalimantan Timur). Ketersediaan bandar udara belum mencukupi, baik dari jumlah maupun persebarannya terutama untuk menjangkau daerah-daerah terpencil yang sulit diakses dengan menggunakan transportasi laut/sungai dan transportasi darat.

Selain itu, terbatasnya dukungan infrastruktur penunjang kegiatan ekonomi juga menjadi masalah di wilayah Kalimantan. Hal ini dapat dilihat dari masih terbatasnya kapasitas listrik terpasang di wilayah Kalimantan yaitu sebesar 4,9 persen dari kapasitas listrik nasional, sedangkan produksi listrik di wilayah Kalimantan hanya mencapai 4.58 persen dari produksi listrik nasional.

Permasalahan yang perlu segera ditangani di wilayah Kalimantan adalah perusakan hutan, pembalakan hutan, dan kebakaran hutan. Pada tahun 2007, luas konversi hutan untuk penggunaan pertanian atau perkebunan adalah 1,4 juta hektar atau 30,4 persen dari luas konversi kawasan hutan nasional dengan konversi terbesar terjadi di Provinsi Kalimantan Tengah. Sementara itu, luas pelepasan kawasan hutan untuk permukiman transmigrasi di wilayah Kalimantan sebesar 20,77 persen dari total nasional. Tahun 2007, luas kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan mencapai 3,3 persen dari luas kebakaran hutan nasional dengan jumlah titik api tersebar di Provinsi Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah. Pada tahun 2007 tercatat luas lahan kritis wilayah Kalimantan sebesar 35,88 persen dari total luas lahan kritis nasional yang sebagian besar berada di Provinsi Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur. Selain itu, laju deforestasi yang meningkat juga berdampak semakin tingginya tingkat kerusakan sumberdaya hayati dan nonhayati, serta meningkatnya kerusakan daerah aliran sungai (DAS) dalam kondisi kritis yang mengancam kelangkaan sumber daya air bersih. Wilayah Kalimantan juga menghadapi risiko terjadinya bencana alam seperti banjir, longsor, dan kekeringan akibat perusakan dan pencemaran lingkungan hidup dan juga terjadinya perubahan iklim global.

Wilayah Kalimantan memiliki potensi sumber daya energi (batu bara, gas alam, minyak bumi, panas bumi, dan air) yang belum dimanfaatkan secara optimal. Lahan terbuka hijau yang tersedia terus turun seiring dengan bertambahnya aktivitas ekonomi. Wilayah Kalimantan memiliki kawasan lindung terluas di Indonesia, yaitu 47 persen dari total kawasan lindung di Indonesia. Wilayah itu memiliki kawasan suaka alam dan pelestarian alam darat dan perairan yang cukup luas dan kaya dengan keanekaragaman hayati (flora dan fauna).

GAMBAR 4.9
PETA KAWASAN PERBATASAN DI WILAYAH KALIMANTAN



Sumber : Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal (diolah)

Dalam bidang pertahanan dan keamanan, dua masalah utama yang dihadapi oleh wilayah Kalimantan adalah pengamanan dan pengembangan daerah perbatasan dan konflik horizontal meskipun kedua masalah ini tidak terjadi di semua provinsi di wilayah Kalimantan. Wilayah Kalimantan berbatasan dengan negara Malaysia, yaitu di Provinsi Kalimantan Timur (Nunukan, Malinau, Kutai Barat) dengan garis batas sepanjang ± 1200 km dan Provinsi Kalimantan Barat (Sambas, Sanggau, Bengkayang, Sintang, Kapuas Hulu) berbatasan dengan bagian Serawak Malaysia dengan kawasan perbatasan yang memanjang dengan garis batas sepanjang ± 870 km. Selain wilayah perbatasan, wilayah Kalimantan memiliki daerah tertinggal yang tersebar di Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.

4.1.2 Isu Strategis

Dari uraian fakta, potensi, dan permasalahan di wilayah Kalimantan, dapat ditarik beberapa isu strategis di wilayah Kalimantan yaitu sebagai berikut.

1. **Optimalisasi pengembangan sektor dan industri unggulan wilayah berbasis pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan dan kelautan**

Perekonomian wilayah Kalimantan, khususnya Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan, memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap sumberdaya alam tidak terbarukan. Di sisi lain, pengelolaan sumber daya alam terbarukan yang sangat besar di wilayah ini belum optimal menjadi penggerak utama perekonomian wilayah. Hal ini ditunjukkan oleh rendahnya nilai tambah komoditas pertanian, perkebunan, kehutanan dan perikanan akibat belum berkembangnya mata rantai industri pengolahan demikian pula dengan potensi wisata alam dan budaya yang kurang berkembang. Isu strategis pengembangan ekonomi wilayah Kalimantan adalah rendahnya investasi, ketidakpastian status dan izin pertanahan, kompleksitas perizinan usaha, terbatasnya jaringan sarana dan prasarana produksi, terbatasnya pasokan energi dan listrik, dan belum optimalnya kerja sama antardaerah dalam pengembangan dan pemasaran produk unggulan.

2. **Kuantitas dan kualitas jaringan infrastruktur wilayah**

Wilayah Kalimantan yang sangat luas masih dilayani jaringan jalan darat yang terbatas dan belum sepenuhnya terintegrasi dengan jaringan transportasi lain. Kondisi ini ditambah lagi dengan tingginya persentase jalan dalam kondisi rusak berat dan ringan, baik pada jalan negara, jalan provinsi, dan jalan kabupaten. Dengan kondisi jaringan infrastruktur seperti itu, keterkaitan antardaerah dan antara sentra produksi di perdesaan dan pusat-pusat pertumbuhan di perkotaan menjadi kurang optimal. Di sisi lain, jalur transportasi sungai yang secara tradisional diandalkan seringkali mengalami pasang surut di daerah hulu yang mengakibatkan semakin terbatasnya aksesibilitas desa-desa di pedalaman.

3. **Kesenjangan intrawilayah Kalimantan**

Dengan menggunakan PDRB per kapita sebagai salah satu ukuran perkembangan perekonomian dan kesejahteraan wilayah, Provinsi Kalimantan Timur merupakan salah satu provinsi terkaya secara nasional. PDRB per kapita Provinsi Kalimantan Timur adalah sekitar enam kali lipat PDRB per kapita provinsi lain. Dengan menggunakan PDRB per kapita nonmigas sebagai ukuran, PDRB per kapita Provinsi Kalimantan Timur masih sekitar tiga kali lipat provinsi-provinsi lain di wilayah Kalimantan. Kondisi ini menunjukkan masih tingginya kesenjangan intrawilayah Kalimantan.

4. **Degradasi sumber daya alam dan lingkungan hidup serta mitigasi bencana**

Laju konversi lahan hutan menjadi lahan perkebunan dan pertanian tergolong tinggi. Hal ini diperparah dengan praktik pembalakan hutan secara liar dan pertambangan liar. Dampak konversi lahan adalah tingginya kerusakan daerah

aliran sungai (DAS), relatif meningkatnya bencana banjir, dan menurunnya fungsi sungai sebagai salah satu jaringan transportasi wilayah. Selain itu, pembukaan hutan secara tidak bertanggung jawab sering berujung pada bencana kebakaran hutan dan polusi udara yang menyebar ke negara tetangga. Di samping itu, kerusakan hutan dan lingkungan yang mengancam keanekaragaman hayati wilayah Kalimantan cukup tinggi. Dalam jangka panjang, degradasi sumber daya alam dan lingkungan hidup akan menurunkan daya dukung lingkungan yang mengancam produktivitas perekonomian wilayah Kalimantan yang berbasis sumber daya alam.

5. Kualitas sumberdaya manusia dan tingkat kemiskinan

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai indikator kualitas sumber daya manusia menunjukkan posisi Provinsi Kalimantan Barat dan Kalimantan Selatan pada tahun 2008 di bawah rata-rata nasional, masing-masing berada pada peringkat 29 dan 26 dari 33 provinsi. Adapun posisi Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah berada di atas rata-rata nasional masing-masing dengan peringkat 5 dan 7. Meskipun tingkat kemiskinan di wilayah Kalimantan relatif rendah jika dibandingkan dengan tingkat kemiskinan nasional, kondisi masyarakat di pedalaman rawan jatuh miskin karena terbatasnya alternatif kegiatan ekonomi dan akses pelayanan sosial dasar.

6. Pembangunan kawasan perbatasan

Kawasan perbatasan berperan sangat strategis dalam menjaga keutuhan kedaulatan wilayah nasional. Namun, permasalahan yang dihadapi adalah tingginya kesenjangan pembangunan dengan wilayah negara tetangga yang mendorong masyarakat di kawasan perbatasan untuk memilih berhubungan dengan negara tetangga yang memiliki prasarana penunjang yang relatif baik. Di sisi lain, terbatasnya pengawasan di sepanjang perbatasan darat memicu pemanfaatan sumber daya alam secara ilegal. Di laut, belum tuntasnya penetapan batas negara berpotensi menyebabkan terjadinya konflik pemanfaatan sumber daya alam khususnya dan klaim pulau-pulau terdepan/terluar.

7. Kualitas birokrasi dan tata kelola dalam kerangka otonomi daerah

Beberapa daerah di wilayah Kalimantan memperoleh dana bagi hasil sumber daya alam yang besar. Namun, pemanfaatan dan pengelolaan dana masih belum optimal bagi peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Isu strategis yang harus diatasi dalam lima tahun mendatang adalah mengembangkan tata pemerintahan yang baik dan meningkatkan kapasitas aparat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Isu strategis lainnya adalah perlunya harmonisasi dan konsistensi peraturan perundang-



undangan antara pusat dan daerah dalam meningkatkan iklim investasi di daerah.

4.2 Arah Pengembangan Wilayah

Pengembangan wilayah Kalimantan mempunyai peran yang sangat penting dalam mendukung peningkatan kinerja pembangunan nasional. Wilayah Kalimantan memiliki posisi geografis yang strategis di wilayah barat dan tengah Indonesia yang berbatasan dengan negara tetangga Malaysia. Posisi wilayah Kalimantan sangat strategis mengingat dalam konteks keterkaitan antarwilayah, wilayah Kalimantan berada pada posisi yang berhadapan langsung dengan pulau-pulau besar lain di Indonesia. Dengan memperhatikan Rancangan Rencana Tata Ruang Wilayah Kalimantan, pengembangan wilayah Kalimantan diarahkan untuk (1) memelihara dan memulihkan kawasan yang berfungsi lindung dan kritis lingkungan dalam rangka mendukung keberlanjutan pemanfaatan sumber daya kehutanan, pertambangan, pertanian, dan sumber daya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil, serta mengurangi risiko dampak bencana alam; (2) mendayagunakan posisi strategis secara geografis yang berdekatan dengan negara bagian Malaysia di Sarawak dan Sabah dalam kerangka kerja sama ekonomi subregional BIMP-EAGA; (3) mendorong percepatan penanganan kawasan perbatasan antarnegara dengan negara Malaysia di Serawak dan Sabah sebagai beranda depan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia di wilayah Kalimantan; (4) meningkatkan aksesibilitas internal wilayah Kalimantan untuk mewujudkan sinergi pengembangan potensi wilayah dan pemerataan tingkat perkembangan antarwilayah melalui percepatan fungsionalisasi jaringan jalan lintas Kalimantan secara terpadu dengan pengembangan jaringan angkutan sungai, angkutan laut, jaringan jalan rel kereta api dan angkutan udara; (5) mendorong peran kawasan andalan sebagai penggerak pengembangan ekonomi wilayah Kalimantan; (6) mengembangkan industri pengolahan yang berbasis pada sektor kelautan, pertanian, perkebunan, pertambangan, kehutanan secara berkelanjutan, dan industri pariwisata yang berbasis pada penguatan dan pengembangan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat lokal dan kelestarian fungsi lingkungan hidup; dan (7) mendorong berfungsinya pusat-pusat permukiman perkotaan sebagai pusat pelayanan jasa koleksi dan distribusi di wilayah Kalimantan.

Pengembangan sistem pusat permukiman di wilayah Kalimantan ditekankan pada terbentuknya fungsi dan hierarki pusat permukiman sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional yang meliputi pusat kegiatan nasional, pusat kegiatan wilayah, pusat kegiatan lokal dan pusat kegiatan strategis nasional di kawasan perbatasan negara. Pengembangan PKN di wilayah Kalimantan diarahkan untuk (1) mendorong pengembangan kota Balikpapan, Banjarmasin, dan Pontianak sebagai pusat pelayanan primer; (2) mendorong pengembangan kota Palangkaraya, Samarinda, Bontang, dan Tarakan sebagai pusat pelayanan sekunder.

Pengembangan PKW di wilayah Kalimantan diarahkan untuk (1) mendorong

pengembangan kota Singkawang, Sambas, Ketapang, Sintang, Sanggau, Sampit, Kuala Kapuas, Tanjung Redeb, Sangata, Tanjung Selor, Malinau, Nunukan, dan Tenggarong sebagai pusat pelayanan sekunder; dan (2) mendorong pengembangan kota Mempawah, Putussibau, Entikong, Pangkalan Bun, Buntok, Muarateweh, Amuntai, Martapura, Marabahan, Kotabaru, Tanlumbis, Sungai Nyamuk, Sangasanga, Tanah Grogot, dan Sendawar sebagai pusat pelayanan tersier.

Pengembangan PKL di wilayah Kalimantan ditetapkan melalui peraturan daerah provinsi berdasarkan usulan pemerintah kabupaten/kota dengan kriteria sebagaimana ditetapkan dalam RTRWN dan pengembangan kota-kota PKL merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengembangan sistem pusat permukiman di wilayah Kalimantan. Pengembangan PKSN di wilayah Kalimantan, terutama kawasan perbatasan negara, diarahkan untuk mendorong pengembangan Kota Aruk, Jagoibabang, Nangabadau, Entikong, Jasa, Nunukan, Simanggaris, Long Midang, dan Long Pahangai.

4.3 Tujuan dan Sasaran Pengembangan Wilayah

Berdasarkan arahan pengembangan wilayah Kalimantan, tujuan pembangunan wilayah Kalimantan dalam kurun waktu 2010—2014 adalah untuk:

1. meningkatkan standar hidup masyarakat di wilayah Kalimantan;
2. meningkatkan produksi dan produktivitas sektor pertanian, perkebunan, perikanan dan pertambangan di wilayah Kalimantan;
3. meningkatkan ketersediaan, kualitas, dan jangkauan pelayanan prasarana dan sarana transportasi, baik darat, laut maupun udara;
4. meningkatkan jumlah, mutu dan jangkauan sistem jaringan prasarana dasar (jalan, pelabuhan, lapangan udara, telekomunikasi, listrik dan telepon);
5. meningkatkan aksesibilitas masyarakat wilayah Kalimantan terhadap pelayanan publik dasar;
6. mewujudkan keseimbangan pembangunan wilayah Kalimantan bagian Timur dengan wilayah Kalimantan bagian Barat, Tengah, dan Selatan;
7. meningkatkan sinergi dalam pengelolaan sumber daya hutan dan tambang dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan dan hak ulayat, perlindungan masyarakat adat, dan pengembangan usaha;
8. meningkatkan fungsi transportasi laut dan sungai untuk daerah terpencil dan pedalaman di wilayah Kalimantan;
9. meningkatkan aksesibilitas antarwilayah di Kalimantan dan daerah perbatasan;
10. meningkatkan kondisi keamanan dan pengawasan kawasan perbatasan antara Kalimantan dan Malaysia.

Jika mengacu pada tujuan pengembangan wilayah Kalimantan, sasaran yang dicapai dalam rangka pengembangan wilayah Kalimantan pada kurun waktu tahun 2010—2014 adalah sebagai berikut:

1. meningkatnya standar hidup masyarakat wilayah Kalimantan yang ditunjukkan dengan membaiknya berbagai indikator pembangunan, yaitu pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, pengangguran, angka kematian bayi, angka harapan hidup, pengangguran serta pendapatan per kapita.
2. meningkatnya ketersediaan, kualitas, dan jangkauan pelayanan prasarana dan sarana transportasi, baik darat, laut maupun udara;
3. meningkatnya jumlah, mutu, dan jangkauan sistem jaringan prasarana dasar (jalan, pelabuhan, lapangan udara, telekomunikasi, listrik dan telepon);
4. meningkatnya aksesibilitas masyarakat wilayah Kalimantan terhadap pelayanan publik dasar;
5. terwujudnya keseimbangan pembangunan wilayah Kalimantan bagian Timur dengan wilayah Kalimantan bagian Barat, Tengah, dan Selatan;
6. meningkatnya sinergi dalam pengelolaan sumber daya hutan dan tambang dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan dan hak ulayat, perlindungan masyarakat adat, dan pengembangan usaha.

TABEL 4.4
SASARAN PERTUMBUHAN EKONOMI, KEMISKINAN DAN PENGANGGURAN
DI WILAYAH KALIMANTAN TAHUN 2010—2014

Provinsi	Pertumbuhan Ekonomi (%) ¹⁾		Kemiskinan ²⁾		Pengangguran ³⁾	
	2010	2014	2010	2014	2010	2014
Kalimantan Barat	4,7 – 5,2	4,8 – 5,4	8,03 – 7,94	4,66 – 4,59	5,7 – 6,2	4,9 – 5,4
Kalimantan Tengah	5,0 – 5,6	6,1 – 6,7	6,94 – 6,61	3,61 – 3,57	3,9 – 4,3	2,9 – 3,3
Kalimantan Selatan	5,5 – 5,9	6,3 – 6,9	4,01 – 3,85	1,01 – 1,01	5,1 – 5,6	3,9 – 4,3
Kalimantan Timur	3,0 – 3,5	3,6 – 4,1	5,87 – 5,52	2,03 – 2,01	8,2 – 9,1	5,5 – 6,1

Sumber : Perhitungan Bappenas; BPS; Susenas;

*Keterangan: ¹⁾ *Pertumbuhan Ekonomi: persentase laju perubahan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).*

²⁾ *Kemiskinan: persentase jumlah penduduk miskin terhadap total jumlah penduduk.*

³⁾ Pengangguran: persentase jumlah pengangguran terbuka terhadap total angkatan kerja.

TABEL 4.5
SASARAN ANGKA KEMATIAN BAYI, ANGKA HARAPAN HIDUP,
RATA-RATA LAMA SEKOLAH DAN PENDAPATAN PER KAPITA
DI WILAYAH KALIMANTAN TAHUN 2010—2014

Provinsi	Angka Kematian Bayi ¹⁾		Rata-Rata Lama Sekolah ²⁾		Angka Harapan Hidup ³⁾		Pendapatan per kapita (Rp. Ribu) ⁴⁾	
	2010	2014	2010	2014	2010	2014	2010	2014
Kalimantan Barat	28	25	7,06	7,42	70,31	71,04	6.763,97	7.174,57
Kalimantan Tengah	23	21	8,25	8,56	71,75	72,31	8.244,58	9.043,21
Kalimantan Selatan	34	30	7,68	7,96	68,54	69,79	8.224,03	8.758,01
Kalimantan Timur	20	14	9,24	9,68	72,63	73,74	35.103,57	38.757,95

Sumber : Perhitungan Bappenas; BPS; Susenas;

*Keterangan: ¹⁾ Angka Kematian Bayi: jumlah bayi yang meninggal sebelum mencapai usia 1 tahun per 1000 kelahiran hidup.

²⁾ Rata-rata Lama Sekolah: rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani.

³⁾ Angka Harapan Hidup: perkiraan lama hidup rata-rata penduduk.

⁴⁾ Pendapatan per kapita: pendapatan regional dibagi dengan jumlah penduduk pada pertengahan tahun.

4.4 Arah Kebijakan dan Strategi Pengembangan

Berdasarkan tujuan, dan sasaran serta mempertimbangkan isu strategis wilayah Kalimantan, arah kebijakan dan strategi pengembangan wilayah Kalimantan dalam kurun waktu 2010—2014 adalah:

1. Pengembangan Kalimantan sebagai sentra produksi pertanian, perkebunan, kehutanan, dan perikanan dilaksanakan dengan strategi pengembangan yaitu meningkatkan produktivitas budi daya tanaman pangan, perkebunan, kehutanan, dan perikanan.
2. Pengembangan gugus (cluster) industri pengolahan berbasis sumber daya alam dilaksanakan dengan strategi mengembangkan Pontianak, Palangkaraya,

- Banjarmasin, dan Balikpapan sebagai pusat industri pengolahan berbasis sumber daya alam yang melayani sentra-sentra produksi di sekitarnya.
3. Pengembangan Kalimantan sebagai lumbung energi nasional, yang dilaksanakan dengan strategi pengembangan:
 - a. mengoptimalkan industri migas dan pertambangan;
 - b. mengembangkan industri energi alternatif terbarukan.
 4. Pengembangan industri pariwisata alam dan budaya yang dilakukan dengan strategi mengembangkan gugus (cluster) industri pariwisata.
 5. Pengembangan sistem jaringan infrastruktur perhubungan multimoda terintegrasi memperkuat keterkaitan domestik antarwilayah dengan strategi:
 - a. mengintegrasikan integrasi jaringan jalan dan jaringan transportasi lainnya;
 - b. meningkatkan pelayanan jaringan angkutan sungai dan laut dan mengintegrasikannya dengan jaringan transportasi lainnya;
 - c. meningkatkan integrasi jaringan angkutan udara dan jaringan lainnya;
 - d. meningkatkan jangkauan pelayanan telekomunikasi.
 6. Pengembangan Kalimantan sebagai wilayah tumbuh pesat dan merata dengan strategi mengembangkan produk/industri unggulan wilayah dan kerja sama antardaerah.
 7. Peningkatan daya dukung lingkungan untuk menjamin keberlanjutan pembangunan dan mempertahankan fungsi Kalimantan sebagai paru-paru dunia dengan strategi pengembangan:
 - a. meningkatkan konservasi dan rehabilitasi daerah aliran sungai (DAS), lahan kritis, hutan lindung, dan hutan produksi;
 - b. mengembangkan sistem mitigasi bencana alam banjir dan kebakaran hutan.
 8. Pengembangan angkutan kerja berkualitas dan berdaya saing dengan strategi pengembangan:
 - a. meningkatkan akses pendidikan;
 - b. meningkatkan akses pelatihan keterampilan kerja;
 - c. meningkatkan jangkauan pelayanan kesehatan.
 9. Peningkatan kesejahteraan rakyat melalui pengembangan ekonomi lokal dengan strategi pengembangan:
 - a. memperluas dan meningkatkan sinergi program-program penanggulangan kemiskinan;



- b. memperluas kesempatan usaha dan meningkatkan pemberdayaan rumah tangga miskin.
10. Pengembangan kawasan perbatasan sebagai beranda depan wilayah nasional dengan strategi pengembangan:
- a. meningkatkan stabilitas keamanan dan ketertiban kawasan perbatasan;
11. meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kawasan perbatasan dengan pengembangan ekonomi lokal.
12. Pengembangan daerah otonom yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik dengan strategi pengembangan:
- a. meningkatkan kualitas legislasi dan regulasi;
 - b. meningkatkan penegakan hukum, hak asasi manusia (HAM), dan pemberantasan korupsi;
 - c. meningkatkan kualitas pelayanan publik.

MATRIK BUKU III RPJMN 2010-2014 WILAYAH KALIMANTAN
ISU STRATEGIS, ARAH KEBIJAKAN, WILAYAH, STRATEGI PENGEMBANGAN DAN FOKUS PRIORITAS

ISU STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN	WILAYAH	STRATEGI PENGEMBANGAN	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS
<p>Optimalisasi pengembangan sektor dan komoditas unggulan berbasis sumber daya alam:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ketergantungan perekonomian daerah (Kaltim, Kalsel) terhadap sumberdaya alam tak terbarukan (<i>non renewable resources</i>) • Rendahnya nilai tambah komoditas unggulan tanaman pangan, perkebunan, kehutanan, dan perikanan • Tingginya potensi wanawisata, keragaman hayati dan spesies endemik, wisata bahari, serta wisata budaya 	<p>Pengembangan Kalimantan sebagai sentra produksi pertanian, perkebunan, kehutanan, dan perikanan</p>	<p>Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur</p>	<p>Meningkatkan produktivitas budidaya pertanian tanaman pangan, perkebunan, kehutanan, dan perikanan</p>	<p>Prioritas Nasional</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penataan regulasi untuk menjamin kepastian hukum atas lahan pertanian • Penertiban, serta optimalisasi penggunaan lahan terlantar • Dorongan untuk investasi pangan, pertanian, dan industri perdesaan berbasis produk lokal oleh pelaku usaha dan pemerintah • Pembangunan pembangkit dan jaringan transmisi untuk sentra produksi pertanian • Perluasan areal pertanian • Peningkatan upaya penelitian dan pengembangan bidang pertanian yang mampu menciptakan benih unggul dan hasil penelitian lainnya menuju kualitas dan produktivitas hasil pertanian nasional yang tinggi • Penyaluran subsidi benih tanaman pangan • Penyaluran pupuk bersubsidi • Pengadaan prasarana transportasi perdesaan • Rehabilitasi Jaringan Irigasi • Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi • Pembangunan / peningkatan Jaringan Rawa • Rehabilitasi Jaringan Rawa • Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Rawa • Pembangunan / peningkatan Jaringan Irigasi Air Tanah

ISU STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN	WILAYAH	STRATEGI PENGEMBANGAN	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS
				<ul style="list-style-type: none"> • Rehabilitasi Jaringan Irigasi Air Tanah • Pembangunan pembangkit dan jaringan transmisi untuk sentra produksi pertanian • Pengembangan ketersediaan dan penanganan rawan pangan. • Pengembangan Sistem Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan. • Pengembangan penganeekaragaman konsumsi pangan dan peningkatan keamanan pangan segar • Pelaksanaan penelitian dan pengembangan Sumberdaya Lahan Pertanian (Kalbar, Kalteng, Kalsel, Kaltim) • Peningkatan/Rehabilitasi jaringan irigasi dan O & P Jaringan Irigasi. • Peningkatan keberdayaan pengelolaan lahan gambut • Kawasan minapolitan (Kalbar), • Pengembangan KUB • Sentra produksi perikanan (Kalbar, Kaltim), sistem rantai dingin • Peningkatan kapal perikanan Indonesia (yang laik laut laik tangkap dan laik simpan) alat penangkap ikan (yang sesuai SNI) dan pengawakan yang memenuhi standar di setiap WPP • Pengawalan dan penerapan teknologi terapan adaptif perikanan budidaya • Pengembangan LPPMHP Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur. • Pemetaan potensi pemasaran dan promosi gemar makan ikan • Pengelolaan Sumberdaya Ikan (Kalsel, Kalteng, Kaltim, Kalbar) • Peningkatan dan penyediaan sarana dan prasarana penunjang kegiatan perikanan • Peningkatan teknologi budidaya dan penangkapan untuk peningkatan produksi perikanan • Peningkatan Sumberdaya Manusia nelayan perikanan tangkap

ISU STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN	WILAYAH	STRATEGI PENGEMBANGAN	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS
				<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan akses petani terhadap permodalan usaha tangkap dan budidaya • Peningkatan akses nelayan terhadap informasi pemasaran • Pengembangan pelabuhan perikanan untuk menampung hasil produksi tangkapan • Pengembangan kawasan peruntukan perikanan pada sentra-sentra produksi perikanan • Pembangunan Bendungan Tritib di Kalsel dan Mrangkayu di Kaltim • Rehabilitasi Waduk/Embung Merancang di Kaltim. <p>Prioritas Pulau</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan dan penerapan teknologi budidaya untuk peningkatan produksi hasil pertanian • Peningkatan Sumberdaya Manusia petani • Peningkatan akses petani terhadap permodalan • Peningkatan petani terhadap informasi pemasaran • Peningkatan sarana dan prasarana penunjang industry pengolahan kayu • Peningkatan teknologi pengolahan kayu • Peningkatan kualitas SDM profesional bidang industry pengolahan kayu • Peningkatan teknologi budidaya dan penangkapan untuk peningkatan produksi perikanan • Peningkatan Sumberdaya Manusia nelayan perikanan tangkap • Peningkatan akses nelayan terhadap informasi pemasaran • Pengembangan pelabuhan perikanan untuk menampung hasil produksi tangkapan • Pengembangan kawasan peruntukan perikanan pada sentra-sentra produksi perikanan
	Pengembangan klaster industri pengolahan berbasis sumber daya	Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan	Mengembangkan klaster industri pengolahan berbasis sumber daya alam di Pontianak,	<p>Prioritas Nasional</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan jaringan prasarana dan penyediaan sarana transportasi antar moda dan antar pulau yang terintegrasi sesuai dengan sistem transportasi nasional dan cetak biru transportasi

ISU STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN	WILAYAH	STRATEGI PENGEMBANGAN	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS
	alam	Kalimantan Timur	Palangka Raya, Banjarmasin, dan Balikpapan yang melayani sentra-sentra produksi di sekitarnya	<p>multimoda</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menyempurnaan peraturan ketenagakerjaan dan sinkronisasi kebijakan ketenagakerjaan (pusat) dengan kebijakan/ peraturan daerah • Mendorong pembentukan lembaga bipartite • Penerapan Keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di perusahaan sesuai standard an manajemen K3 • Peningkatan Kapasitas Pembangkit, Jaringan dan Gardu Transmisi Listrik • Peningkatan akses komunikasi data dan suara • Revitalisasi Pasar Tradisional • Pembangunan Jalan Lintas Kalimantan • Pembangunan dan Peningkatan kapasitas Pelabuhan a.l. Pontianak, Banjarmasin, Samarinda, Balikpapan, Tarakan serta pelabuhan terpilih lainnya • Pembangunan jalan akses menuju pelabuhan dan bandara utama • Penerapan dan penataan sistem logistik nasional • Pembangunan dan peningkatan kapasitas pelabuhan utama, pengumpul, dan pengumpan di Kalimantan antara lain: Pontianak, Banjarmasin, Samarinda, Balikpapan • Pelabuhan/ bandara internasional di wilayah Kalimantan • Pengelolaan dan Pembangunan Kegiatan di bidang pelabuhan dan pengerukan di Pelabuhan Pontianak, Samarinda, dan Banjarmasin • Pengelolaan Fasilitas Ekspor dan Impor pelabuhan/bandara internasional <p>Prioritas Pulau</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan dan penyediaan sarana dan prasarana penunjang industri pengolahan

ISU STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN	WILAYAH	STRATEGI PENGEMBANGAN	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS
				<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan teknologi pengolahan kelapa sawit dan karet • Peningkatan kualitas SDM profesional bidang industri pengolahan kelapa sawit dan karet • Peningkatan investasi • Mengembangkan kawasan pengolahan komoditas kelapa sawit • Mengembangkan outlet Bandar Udara Sanggau dilengkapi fasilitas bongkar muat untuk mendukung komoditas kelapa sawit, karet dan tanaman pangan • peningkatan fungsi dan kualitas pelayanan prasarana dan sarana di dalam kawasan andalan

ISU STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN	WILAYAH	STRATEGI PENGEMBANGAN	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS
	Pengembangan Kalimantan sebagai lumbung energi nasional	Kalimantan Timur Kalimantan Selatan	Mengoptimalkan industri migas dan pertambangan	<p>Prioritas Nasional</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan Coal Bed Kalimantan Timur. • Peningkatan kapasitas pelabuhan • Pengelolaan Fasilitas Ekspor dan Impor pelabuhan <p>Prioritas Pulau</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan dan penyediaan sarana dan prasarana penunjang industri pertambangan • Peningkatan teknologi pengolahan pertambangan • Peningkatan kualitas SDM profesional bidang industri pengolahan pertambangan • Pengembangan jaringan gas perkotaan • Peningkatan koversi BBM ke gas pada sarana transportasi • meningkatkan jaringan infrastruktur yang menghubungkan pengilangan minyak di Pulau Bunyu dengan daerah eksplorasi • pengembangan kilang minyak di Balikpapan • pengembangan jaringan jalan penghubung lokasi pertambangan dan pelabuhan

ISU STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN	WILAYAH	STRATEGI PENGEMBANGAN	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS
		Kalimantan Barat Kalimantan Tengah	Mengembangkan industri energi alternatif terbarukan	<p>Prioritas Nasional</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan unit pengolahan Biofuel (5-6 desa terpilih). • Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman tahunan (Penyediaan Bahan bakar Bio Energi) yaitu Klp Sawit; Jarak Pagar. • Pengembangan tenaga listrik surya dengan daya kecil untuk penerangan, melalui pembuatan Modul tenaga listrik surya daya tertentu. <p>Prioritas Pulau</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan pusat pengolahan minyak dan petrokimia (methanol) serta pusat pengolahan biodiesel dari kelapa sawit. • Peningkatan dan penyediaan sarana dan prasarana penunjang industri energi terbarukan. • Peningkatan kualitas SDM profesional bidang industri energi terbarukan. • Peningkatan investasi di bidang energi alternatif terbarukan.
	Pengembangan industri pariwisata alam dan budaya	Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur	Mengembangkan klaster industri pariwisata alam dan budaya	<p>Prioritas Nasional</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE). • Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Penanaman Modal. • Pengembangan Pengelolaan Peninggalan Kepurbakalaan. • Pengembangan Pengelolaan Permuseuman. • Penelitian dan Pengembangan Bidang Arkeologi. • Penelitian dan Pengembangan Bidang Kebudayaan. • Pelestarian dan Pengembangan Kesenian. <p>Prioritas Pulau</p>

ISU STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN	WILAYAH	STRATEGI PENGEMBANGAN	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS
				<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan promosi pariwisata. • Pengembangan jalur transportasi intermoda menuju tujuan wisata. • Peningkatan kerjasama antar daerah dalam pengembangan interkoneksi obyek-obyek wisata lokal di wilayah Kalimantan.
<p>Kuantitas dan kualitas jaringan infrastruktur:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Terbatasnya kuantitas dan kualitas prasarana perhubungan • Lemahnya integrasi jaringan infrastruktur multimoda • Lemahnya aksesibilitas wilayah-wilayah pedalaman 	<p>Pengembangan sistem jaringan infrastruktur perhubungan multimoda terintegrasi yang memperkuat keterkaitan (interkoneksi) domestik dan jaringan telekomunikasi</p>	<p>Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur</p>	<p>Meningkatkan integrasi jaringan jalan dengan memperhatikan integrasinya dengan jaringan transportasi lainnya</p> <p>Meningkatkan pelayanan jaringan angkutan sungai dan laut dengan memperhatikan integrasinya dengan jaringan transportasi lainnya</p>	<p>Prioritas Nasional</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan Jalan Lintas Kalimantan. • Pembangunan jalur kereta api Puruk Cahu - Bangkuang di Kalimantan Tengah. • Pembangunan jalan akses menuju pelabuhan dan bandara utama. • Pelaksanaan preservasi jalan nasional lintas Kalimantan, Peningkatan kapasitas jalan nasional lintas terutama lintas Selatan Kalimantan, serta jalan strategis nasional terutama jalan menuju kawasan perbatasan. • Pengelolaan Fasilitas Ekspor dan Impor Pelabuhan/ bandara internasional di wilayah Kalimantan. • Pengelolaan dan Pembangunan Kegiatan di bidang pelabuhan dan pengerukan 3 Lokasi (Pelabuhan Pontianak, Samarinda, dan Banjarmasin). • Penggunaan gas alam sebagai bahan bakar angkutan umum perkotaan di Balikpapan, Samarinda dan Tarakan. <p>Prioritas Nasional</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan dan Peningkatan kapasitas Pelabuhan a.l. Pontianak, Banjarmasin, Samarinda, Balikpapan, Tarakan serta pelabuhan terpilih lainnya • Subsidi perintis dan PSO angkutan laut. • pembangunan navigasi dan sistem telekomunikasi pelayaran (VTS ,AIS) di wilayah

ISU STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN	WILAYAH	STRATEGI PENGEMBANGAN	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS
				<p>Kalimantan</p> <ul style="list-style-type: none"> • pengerukan alur pelayaran di pelabuhan Pontianak, Banjarmasin, Samarinda, Balikpapan, Tarakan. • Pembangunan dan peningkatan kapasitas pelabuhan utama, pengumpul, dan pengumpan di Kalimantan antara lain: Pontianak, Banjarmasin, Samarinda, Balikpapan <p>Prioritas Pulau</p> <ul style="list-style-type: none"> • Revitalisasi angkutan sungai • Subsidi angkutan perintis sungai penghubung perdesaan di pedalaman • Fasilitasi permodalan angkutan sungai dan pulau
			Meningkatkan integrasi jaringan transportasi udara dengan memperhatikan integrasinya dengan jaringan transportasi lainnya	<p>Prioritas Nasional</p> <ul style="list-style-type: none"> • Subsidi angkutan perintis udara; • Pengembangan/ Rehabilitasi Supadio, Pangsuma, Rahadi Osman, Susilo, Nangapinoh, Singkawang II, Kuala Kurun, Kuala Pembuang, Tjilik Riwut, H. Asan, Iskandar, Beringin, Sanggu / Sanggo, Tumbang Samba, Syamsuddin Noor, Batu Licin, Tanjung Warukin, Stagen, Sepinggian, Juwata, Kalimarau, Tanjung Harapan, Temindung, Sangkulirang, Melak, Yuvai Semaring, Long Ampung, Long Layu, Datah Dawai, Kotabangun, Long Bawan, Malinau, Nunukan.
			Meningkatkan jangkauan jaringan telekomunikasi	<p>Prioritas Nasional</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan jasa akses telekomunikasi. • Penyediaan jasa akses internet. • Penyediaan regional internet exchange di ibukota provinsi <p>Prioritas Pulau</p>

ISU STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN	WILAYAH	STRATEGI PENGEMBANGAN	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS
<p>Kesenjangan pembangunan intrawilayah:</p> <ul style="list-style-type: none"> PDRB/kapita Kalimantan Timur merupakan yang tertinggi secara nasional dalam lima tahun terakhir, dan besarnya sekitar empat kali PDRB/kapita provinsi-provinsi lain di Kalimantan 	<p>Pegembangan Kalimantan sebagai wilayah yang bertumbuh pesat dan merata</p>	<p>Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur</p>	<p>Mengembangkan produk/industri unggulan wilayah</p>	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan investasi di bidang telekomunikasi <p>Prioritas Pulau</p> <ul style="list-style-type: none"> Memperkuat Badan Kerjasama Antardaerah Fasilitasi kemitraan antara usaha besar dan kecil/menengah Pemanfaatan dana corporate social responsibility (CSR) untuk pemberdayaan UMKM di daerah tertinggal Pengembangan agropolitan di daerah-daerah tertinggal
<p>Degradasi sumber daya alam dan lingkungan hidup dan mitigasi bencana:</p> <ul style="list-style-type: none"> Peran sumber daya alam dan lingkungan hidup sangat tinggi dalam perekonomian wilayah Kalimantan, dalam bentuk komoditas pertambangan, perkebunan, dan hasil hutan. Tingginya keragaman hayati wilayah Kalimantan 	<p>Peningkatan daya dukung lingkungan untuk menjamin keberlanjutan pembangunan dan mempertahankan fungsi Kalimantan sebagai paru-paru dunia</p>	<p>Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur</p>	<p>Meningkatkan konservasi dan rehabilitasi DAS, lahan kritis, hutan lindung, dan hutan produksi</p>	<p>Prioritas Nasional</p> <ul style="list-style-type: none"> Penataan regulasi untuk menjamin kepastian hukum atas lahan pertanian Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Pengelolaan Data dan Informasi Pertanahan Penertiban, serta optimalisasi penggunaan lahan terlantar Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Air Lainnya Peningkatan hasil rehabilitasi seluas 500,000 ha per tahun Penurunan beban pencemaran lingkungan melalui pengawasan ketaatan pengendalian pencemaran air limbah dan emisi. <p>Prioritas Pulau</p> <ul style="list-style-type: none"> Peningkatan kapasitas aparat pemerintah daerah dalam perencanaan tata ruang wilayah

ISU STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN	WILAYAH	STRATEGI PENGEMBANGAN	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS
<ul style="list-style-type: none"> • Tingginya tingkat kerusakan hutan dan pembalakan hutan • Tingginya frekuensi bencana alam terkait perbutana manusia: banjir, kebakaran hutan 			<p>Mengembangkan sistem mitigasi bencana alam banjir dan kebakaran hutan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Integrasi penataan ruang darat dan laut • Peningkatan koordinasi lintas sektor dalam penataan ruang (pertanian, kehutanan, infrastruktur, pertanahan, perikanan dan kelautan) • Peningkatan penegakan hukum dalam pemberantasan pembalakan hutan • Penjaringan aspirasi dan penguatan partisipasi publik dalam perencanaan tata ruang wilayah • Peningkatan partisipasi masyarakat sekitar hutan dalam program konservasi dan rehabilitasi • Peningkatan kerjasama antara pemerintah daerah dan perguruan tinggi/lembaga penelitian • Rehabilitasi lahan-lahan terlantar • Peningkatan penghutanan kembali wilayah hulu daerah aliran sungai (DAS) • Peningkatan pemantauan dan pengendalian aktivitas pertambangan di lahan hutan • Penghormatan hak ulayat atas tanah <p>Prioritas Nasional</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penjaminan berjalannya fungsi Sistem Peringatan Dini Cuaca (MEWS) mulai 2010 dan seterusnya • Penjaminan berjalannya fungsi Sistem Peringatan Dini Iklim (CEWS) pada 2013 • Peningkatan kapasitas aparat pemerintah dan masyarakat dalam usaha pengurangan risiko, mitigasi dan penanganan bencana dan bahaya kebakaran hutan • Penyiapan peralatan dan logistik di kawasan rawan bencana <p>Prioritas Pulau</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penyiapan peta rawan bencana kebakaran dan banjir
Kualitas sumber daya manusia dan penanggulangan kemiskinan:	Pengembangan angkatan kerja	Kalimantan Barat Kalimantan Tengah	Meningkatkan akses pendidikan	<p>Prioritas Nasional</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan Akses Pendidikan Dasar-Menengah

ISU STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN	WILAYAH	STRATEGI PENGEMBANGAN	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS
<ul style="list-style-type: none"> • Tingginya kesenjangan intra wilayah dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM): Kaltim dan Kalteng di atas rata-rata nasional masing-masing di peringkat 5 dan 7, sedangkan Kalbar dan Kalsel masing-masing berperingkat 29 dan 26 pada tahun 2008. • Rendahnya tingkat kesehatan masyarakat di Kalbar dan Kalsel dicerminkan angka harapan hidup yang jauh di bawah rata-rata nasional 	berkualitas dan berdaya saing	Kalimantan Selatan Kalimantan Timur		<ul style="list-style-type: none"> • Pemantapan/ rasionalisasi implementasi BOS • Penurunan harga buku standar di tingkat sekolah dasar dan menengah • Penyediaan sambungan internet ber-content pendidikan ke sekolah tingkat menengah selambat-lambatnya 2012 dan terus diperluas ke tingkat sekolah dasar • Peningkatan Akses Pendidikan Tinggi • Penyesuaian sistem Ujian Akhir Nasional pada 2011 • Penyempurnaan kurikulum sekolah dasar-menengah sebelum tahun 2011. • Pemberdayaan peran Kepala Sekolah sebagai manager sistem pendidikan yang unggul. • Revitalisasi peran Pengawas Sekolah sebagai entitas <i>quality assurance</i>. • Mendorong aktivasi peran Komite Sekolah untuk menjamin keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses pembelajaran. • Mendorong aktivasi peran Dewan Pendidikan di tingkat kabupaten. • Penataan ulang kurikulum sekolah yang dibagi menjadi kurikulum tingkat nasional, daerah, dan sekolah dengan memasukkan pendidikan kewirausahaan. • Program remediasi kemampuan mengajar guru • Penerapan sistem evaluasi kinerja profesional tenaga pengajar. • Peningkatan kerjasama PTN dengan lembaga pendidikan internasional. • Mendorong 11 PT masuk Top 500 THES pada 2014. • Peningkatan perbandingan guru:murid • Memastikan tercapainya Standar Nasional Pendidikan (SNP) bagi Pendidikan Agama dan Keagamaan paling lambat tahun 2013. <p>Prioritas Pulau</p>

ISU STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN	WILAYAH	STRATEGI PENGEMBANGAN	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS
				<ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan beasiswa pendidikan dasar dan Menengah bagi Masyarakat terutama pada penduduk miskin. • Pemberian insentif bagi tenaga guru di pedalaman dan perbatasan. • Pengembangan lembaga pendidikan berbasis kehutanan, perkebunan, dan pertambangan.
			Meningkatkan akses pelatihan keterampilan kerja	<p>Prioritas Pulau</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan balai latihan kerja. • Introduksi teknologi tepat guna di bidang pertanian, perkebunan, perikanan, industri kecil • Pelatihan kewirausahaan. • Pengembangan program magang sebagai bagian dari corporate social responsibility (CSR).
			Meningkatkan jangkauan pelayanan kesehatan	<p>Prioritas Nasional</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak. • Pemberian imunisasi dasar kepada balita. • Penyediaan akses sumber air bersih. • Peningkatan akses sanitasi dasar berkualitas. • peningkatan kualitas layanan rumah sakit berakreditasi internasional. • Pemberlakuan Daftar Obat Esensial Nasional (DOEN) sebagai dasar pengadaan obat di seluruh Indonesia dan pembatasan harga obat generik bermerek. • Perluasan Asuransi Kesehatan Nasional melalui :i) Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin di Puskesmas; ii) Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin di Rumah Sakit; iii) Dukungan Manajemen Pengelolaan, Pembinaan, dan Pengembangan Jaminan Kesehatan. • Pembinaan kesertaan ber KB.

ISU STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN	WILAYAH	STRATEGI PENGEMBANGAN	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS
				<ul style="list-style-type: none"> • Penguatan Sumberdaya Penyelenggara program KB. • Peningkatan advokasi pada stakeholder. • Peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi pengendalian penduduk dan KB. • Penyediaan data dan informasi program kependudukan dan KB. • Pengendalian Penyakit Menular. • Perbaikan Gizi. • Meningkatkan perencanaan dan pendayagunaan SDM Kesehatan (tenaga kesehatan dan residen senior). • Meningkatkan pelayanan medik spesialistik kepada masyarakat melalui RS bergerak. • Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan melalui puskesmas perawatan. <p>Prioritas Pulau</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pemenuhan dan peningkatan fasilitas sarana dan prasarana. • Pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan, terutama untuk pelayanan kesehatan di puskesmas dan jaringannya, serta RS kab/kota terutama di daerah terpencil dan bencana. • Penyusunan dokumen perencanaan SDM Kesehatan. • Peningkatan pelayanan dan akses kesehatan yang bermutu. • Peningkatan pendidikan gizi masyarakat dan Penanganan Masalah gizi Buruk dan gizi Kurang. • Peningkatan akses dan keterjangkauan, air bersih di Babel, Riau, Kepri, Riau, Lampung dan Bengkulu.
	Peningkatan kesejahteraan rakyat	Kalimantan Barat Kalimantan Tengah	Memperluas dan meningkatkan sinergi program-program	<p>Prioritas Nasional</p> <ul style="list-style-type: none"> • PNPM.

ISU STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN	WILAYAH	STRATEGI PENGEMBANGAN	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS
	melalui pengembangan ekonomi lokal	Kalimantan Selatan Kalimantan Timur	penanggulangan kemiskinan	<ul style="list-style-type: none"> • Jamkesmas. • Raskin. • BOS. • Beasiswa. • BLT. • Integrasi Program Perlindungan Sosial berbasis keluarga (PKH, bantuan pangan, jamkesmas, beasiswa anak keluarga berpendapatan rendah, PAUD).
			Memperluas kesempatan usaha dan meningkatkan pemberdayaan rumah tangga miskin	<p>Prioritas Nasional</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penataan regulasi untuk menjamin kepastian hukum atas lahan pertanian. • Pengembangan areal pertanian baru. • Penertiban, serta optimalisasi penggunaan lahan terlantar. • Pembangunan dan pemeliharaan sarana transportasi dan angkutan yang melayani daerah-daerah sentra produksi pertanian di perdesaan • Pembangunan dan pemeliharaan pengairan yang melayani daerah-daerah sentra produksi pertanian. • Pembangunan dan pemeliharaan jaringan listrik yang melayani daerah-daerah sentra produksi pertanian di perdesaan. • Pembangunan dan pemeliharaan teknologi komunikasi dan sistem informasi nasional yang melayani daerah-daerah sentra produksi pertanian demi peningkatan kuantitas dan kualitas produksi serta kemampuan pemasarannya. • Dorongan untuk investasi pangan, pertanian, dan industri perdesaan berbasis produk lokal oleh pelaku usaha dan pemerintah.

ISU STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN	WILAYAH	STRATEGI PENGEMBANGAN	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS
				<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya. • Penyediaan Jasa Telekomunikasi perdesaan. • Pengelolaan Data dan Informasi Pertanian. • Peningkatan Kelancaran Distribusi Bahan Pokok. • Revitalisasi Pasar Tradisional. • Listrik Desa (EBT). • Pengentasan daerah tertinggal. <p>Prioritas Pulau</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan akses permodalan. • Introduksi teknologi tepat guna. • Pengembangan balai latihan kerja. • Peningkatan pendampingan dan fasilitasi dalam pengembangan ekonomi lokal. • Peningkatan peran para pemangku kepentingan dalam pengembangan ekonomi lokal.
Pembangunan kawasan perbatasan: <ul style="list-style-type: none"> • Tingginya kesenjangan kesejahteraan dengan wilayah negara Malaysia di kawasan perbatasan • Tingginya potensi konflik perbatasan laut dengan negara tetangga Malaysia 	Pengembangan kawasan perbatasan sebagai beranda depan wilayah nasional	Kalimantan Barat Kalimantan Timur	Meningkatkan stabilitas keamanan dan ketertiban kawasan perbatasan	<p>Prioritas Nasional</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan dan pengembangan wilayah perbatasan antar negara di Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur • Pemetaan kecamatan kawasan perbatasan darat RI-Malaysia skala 1:50.000 dan 1:25.000. • Perapatan Pilar Batas RI-Malaysia. • Perundingan Teknis Batas Darat; • Perundingan Teknis Batas Maritim; Kajian LKI > 200m. • perundingan penetapan batas maritim Indonesia-Malaysia sampai tahun 2014. • Pemetaan batas wilayah negara (joint mapping) koridor perbatasan darat RI-PNG, RI-

ISU STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN	WILAYAH	STRATEGI PENGEMBANGAN	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS
				<p>Malaysia dalam skala 1:50.000.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pemetaan kecamatan kawasan perbatasan darat RI-PNG, RI-Malaysia, dan RI-RDTL skala 1:50.000 dan 1:25.000. • pemetaan pulau-pulau terluar; penataan batas provinsi/kab/kota; pemetaan wilayah provinsi • pemetaan wilayah kabupaten dan pemetaan wilayah kota kawasan perbatasan • Perapatan Pilar Batas RI-Malaysia • Perundingan Teknis Batas Darat; • Pengkajian dan pemetaan Batas Negara dan Geopolitik • Peningkatan operasional kapal pengawas (KKLD Kakaban, KKLD P. Sembilan, KKLD P. Kabung). • Kerjasama Indonesia – Malaysia dalam penanganan pelintas batas. • Kerjasama Indonesia – Malaysia dalam bentuk Patroli Terkoordinasi (Patkor Indindo). • Pengiriman Liaison Officer (LO) ke negara tetangga yang berbatasan dengan Indonesia. • Pembangunan Prasarana dan Sarana Permukiman di Kawasan Perbatasan dan pulau kecil terluar di Kab. Kapuas Hulu; Kab. Sambas; Kab. Sanggau; Kab. Sintang; Kab. Nunukan; Kab. Kutai Barat. <p>Prioritas Pulau</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelesaian Persoalan Sosial dan Pembangunan. • Meningkatkan upaya pembinaan politik untuk meningkatkan nasionalisme dan rasa kebangsaan. • Penegakkan Hukum dan Keamanan.

ISU STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN	WILAYAH	STRATEGI PENGEMBANGAN	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS
				<ul style="list-style-type: none"> • Penertiban Mekanisme Penempatan dan Perlindungan TKI. • Penataan aktivitas lintas batas serta pemantapan pertahanan dan keamanan untuk mengurangi kegiatan ilegal. • Peningkatan/Pembangunan Fasilitas dan Sarpras TNI. • Pembangunan Pos Polisi, Pos Polmas, dan sarana prasana patroli keamanan di kawasan Pos Lintas Batas serta pulau-pulau kecil terluar penghuni. • Peingkatan kemampuan pelayanan administrasi pengelolaan Pos Lintas Batas (PLB). • Peningkatan kemampuan sarana, prasarana, dan pelayanan keimigrasian pada Pos Lintas Batas (PLB). • Peningkatan kemampuan sarana, prasarana, dan pelayanan kepabeanan pada Pos Lintas Batas (PLB). • Pelayanan karantina pertanian dan pengawasan keamanan hayati. • Operasi pemberdayaan Wilayah Pertahanan.
			<p>Meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kawasan perbatasan dengan mengembangkan kegiatan ekonomi lokal</p>	<p>Prioritas Nasional</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan pulau-pulau kecil terdepan di Kalimantan Timur dan Kalimantan Barat. • Pembangunan Prasarana dan Sarana Permukiman di Kawasan Perbatasan dan pulau kecil terluar Kab. Kapuas Hulu; Kab. Sambas; Kab. Sanggau; Kab. Sintang; Kab. Nunukan; Kab. Kutai Barat. <p>Prioritas Pulau</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pemulihan dan Pemeliharaan kawasan hutan lindung dan konservasi. • Pemulihan dan pemeliharaan ekosistem di pulau kecil terluar. • Pengamanan kawasan hutan Pemanfaatan potensi perikanan dan kelautan di kecamatan

ISU STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN	WILAYAH	STRATEGI PENGEMBANGAN	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS
				<p>Prioritas Pulau</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan transparansi dan akuntabilitas lembaga pemerintah.
			<p>Meningkatkan kualitas pelayanan publik</p>	<p>Prioritas Nasional</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penataan Daerah Otonom dan Otonomi Khusus. • Pembinaan dan Fasilitasi Dana Perimbangan. • Pembinaan Administrasi Anggaran Daerah. • Pembinaan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian. • Pendidikan dan pelatihan Bidang Pemerintahan dan Politik. • Pengembangan Kapasitas dan Evaluasi Kinerja Daerah. • Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerjasama Daerah. • Penetapan dan penerapan sistem indikator kinerja utama pelayanan publik yang selaras antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. • Pengelolaan Informasi Manajemen Kependudukan. • Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Penanaman Modal. <p>Prioritas Pulau</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan standar pelayanan minimum.



BAB V

PENGEMBANGAN WILAYAH SULAWESI TAHUN 2010—2014

5.1 Kondisi Wilayah Sulawesi Saat Ini

5.1.1 Capaian Pembangunan Wilayah

Pertumbuhan ekonomi provinsi-provinsi di wilayah Sulawesi dalam kurun waktu 2004—2008 cenderung terus meningkat. Secara rata-rata pertumbuhan tertinggi terjadi di Provinsi Sulawesi Tengah sebesar 7,7 persen dan Sulawesi Tenggara sebesar 7,6 persen, sedangkan pertumbuhan terendah di Sulawesi Selatan sebesar 5,3 persen. Provinsi Sulawesi Barat sebagai provinsi termuda juga mampu bertumbuh konsisten dalam periode 2006—2008 pada tingkat pertumbuhan rata-rata yang cukup tinggi 7,7 persen (**Tabel 5.1**).

TABEL 5.1
PERTUMBUHAN EKONOMI WILAYAH SULAWESI TAHUN 2004 - 2008
ATAS DASAR HARGA KONSTAN TAHUN 2000 (DALAM PERSEN)

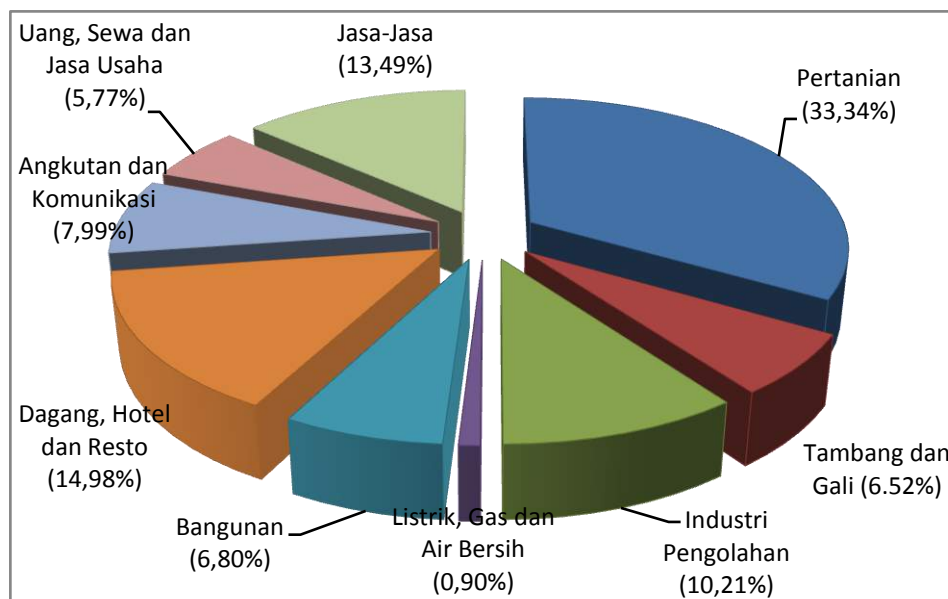
Provinsi	2004	2005	2006	2007	2008
Sulawesi Utara	4,3	4,9	5,7	6,5	8,1
Gorontalo	6,9	7,2	7,3	7,5	7,9
Sulawesi Tengah	7,1	7,6	7,8	8,0	7,9
Sulawesi Selatan	-3,0	15,1	6,7	6,3	7,7
Sulawesi Tenggara	7,5	7,3	7,7	8,0	7,3
Sulawesi Barat	-	-	7,0	7,4	8,6

Sumber : Badan Pusat Statistik

Pada triwulan 1 tahun 2008 perekonomian wilayah Sulawesi didominasi sektor pertanian dengan sumbangan sebesar 33,34 persen dalam pembentukan produk domestik regional bruto (PDRB). Selain sektor pertanian, perekonomian wilayah Sulawesi juga didorong oleh sektor perdagangan, hotel dan restoran, serta sektor jasa. Tingginya peran sektor pertanian bagi perekonomian wilayah juga menggambarkan

peran strategis wilayah ini sebagai salah satu lumbung pangan nasional. Namun di sisi lain, hal ini menunjukkan belum berkembangnya industri pengolahan yang berpotensi meningkatkan nilai tambah komoditas unggulan wilayah.

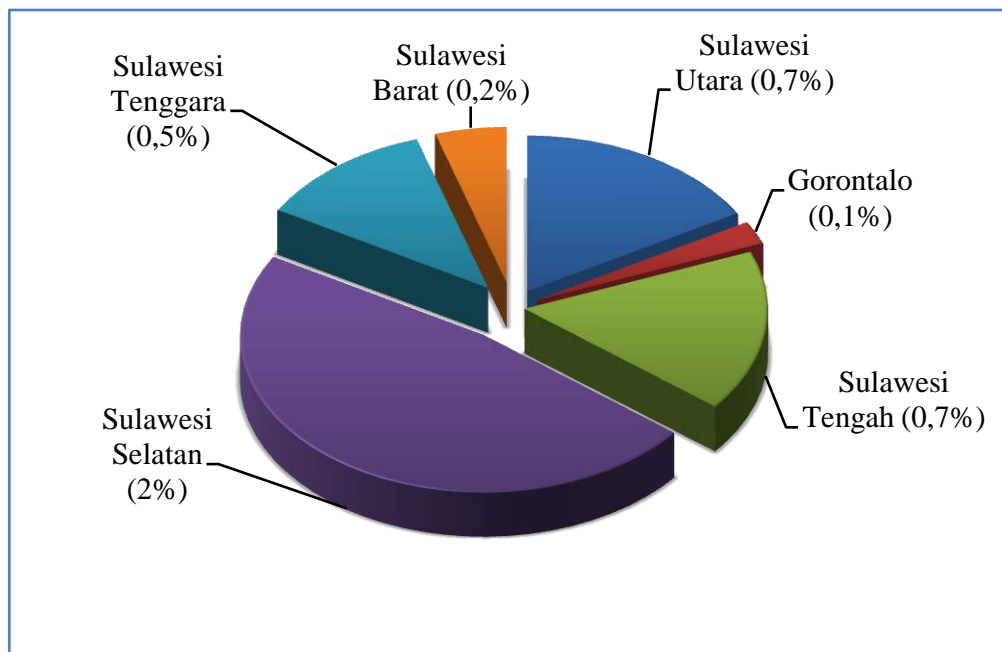
GAMBAR 5.1
KONTRIBUSI EKONOMI WILAYAH SULAWESI MENURUT SEKTOR
ATAS DASAR HARGA BERLAKU TRIWULAN I TAHUN 2008



Sumber : Badan Pusat Statistik (diolah)

Secara nasional, peran wilayah Sulawesi dalam pembentukan total PDRB pada tahun 2008 sebesar 4,2 persen. Dibanding provinsi lain, Provinsi Sulawesi Selatan memberikan kontribusi paling besar terhadap perekonomian nasional, yaitu sebesar 2 persen. Sementara itu, kontribusi provinsi lain di wilayah Sulawesi umumnya kurang dari 1 persen. Besarnya peran Provinsi Sulawesi Selatan menggambarkan peran strategis provinsi ini sebagai pusat pertumbuhan wilayah termasuk kawasan timur Indonesia (**Gambar 5.2**).

GAMBAR 5.2
KONTRIBUSI EKONOMI WILAYAH SULAWESI TERHADAP EKONOMI NASIONAL
ATAS DASAR HARGA BERLAKU TAHUN 2008



Sumber : Badan Pusat Statistik (diolah)

Produk unggulan wilayah Sulawesi berupa komoditas primer yang juga menjadi andalan ekspor nasional. Provinsi Sulawesi Selatan merupakan pusat penghasil padi dengan peran 63 persen dari total produksi wilayah dan 10,3 persen produksi nasional. Di samping itu, Provinsi Sulawesi Selatan bersama dengan Sulawesi Barat dan Sulawesi Tengah juga merupakan sentra produksi kakao yang memasok sekitar 71 persen dari produk nasional. Sementara itu, Provinsi Gorontalo fokus pada produksi jagung. Hampir 50 persen produksi jagung wilayah Sulawesi berasal dari Provinsi Gorontalo, sedangkan Provinsi Sulawesi Utara khususnya Teluk Tomini merupakan penghasil ikan dengan tingkat produksi mencapai hampir 47 persen dari total produksi wilayah. Komoditas perikanan yang memegang peranan penting dalam pendapatan ekspor di Provinsi Sulawesi Utara, antara lain ikan tongkol, kerapu, tuna, udang, rumput laut, teripang, dan mutiara. Potensi lainnya yang bisa dikembangkan sebagai sektor unggulan adalah wisata bahari taman laut dan wisata budaya.

Kegiatan investasi di wilayah Sulawesi masih didominasi penanaman modal dalam negeri (PMDN) dengan perkembangan yang fluktuatif. PMDN wilayah Sulawesi pada tahun 2004 sebesar 1,07 persen dari total PMDN nasional dan pada tahun 2008 meningkat menjadi sebesar 5,63 persen terhadap total PMDN nasional. Penanaman

modal asing (PMA) di wilayah Sulawesi cenderung kecil. Kontribusi PMA di wilayah Sulawesi adalah sebesar 0,60 persen terhadap total PMA secara nasional pada tahun 2004 dan sebesar 0,44 persen terhadap total PMA secara nasional pada tahun 2008.

Produk domestik regional bruto (PDRB) perkapita wilayah Sulawesi terus mengalami peningkatan dengan tingkat ketimpangan antarprovinsi relatif kecil. Gambaran mengenai PDRB perkapita dengan migas atas dasar harga konstan di wilayah Sulawesi dapat dilihat pada Tabel 5.2.

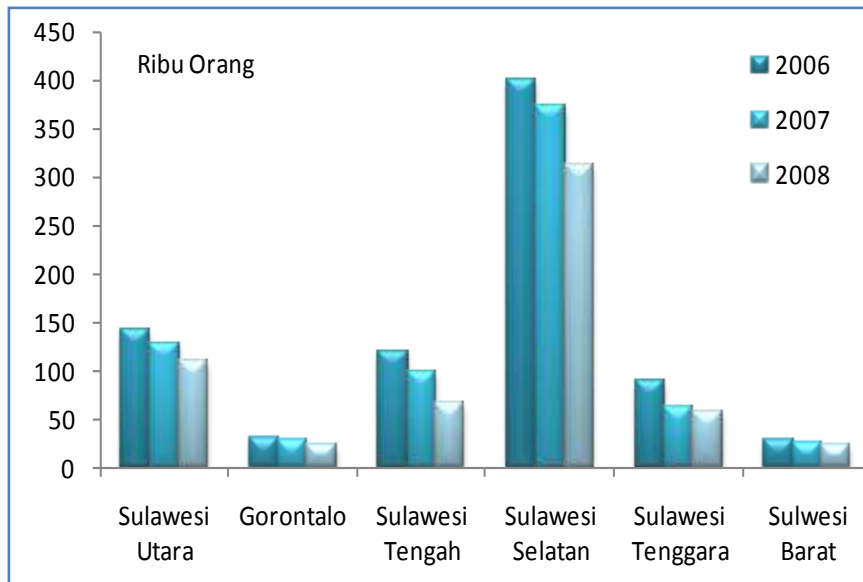
TABEL 5.2
PDRB PERKAPITA DENGAN MIGAS WILAYAH SULAWESI
TAHUN 2004—2008 ATAS DASAR HARGA KONSTAN TAHUN 2000
(DALAM RIBU RUPIAH)

Provinsi	2004	2005	2006	2007	2008
Sulawesi Utara	5,628	5,945	6,222	6,559	6,988
Sulawesi Tengah	4,850	5,083	5,383	5,711	6,057
Sulawesi Selatan	4,642	4,863	5,118	5,368	5,708
Sulawesi Tenggara	3,890	4,126	4,347	4,594	4,824
Gorontalo	2,108	2,166	2,294	2,436	2,593
Sulawesi Barat	-	3,152	3,317	3,509	3,751

Sumber : Badan Pusat Statistik

Jumlah pengangguran terbuka di wilayah Sulawesi menunjukkan bahwa jumlah pengangguran di Provinsi Sulawesi Selatan tertinggi. Namun, persentase pengangguran terbuka tertinggi terjadi di Provinsi Sulawesi Utara. Provinsi Gorontalo dan Sulawesi Barat memiliki jumlah dan tingkat pengangguran paling rendah di tingkat wilayah, tetapi juga memiliki PDRB per kapita yang paling rendah. Hal ini mengindikasikan bahwa sektor pertanian dan perkebunan di kedua provinsi ini mampu menyerap tenaga kerja, namun memiliki nilai tambah relatif kecil. Secara lebih terperinci, perkembangan jumlah pengangguran terbuka di wilayah Sulawesi antara tahun 2006 sampai dengan 2008 dapat dilihat pada Gambar 5.3.

GAMBAR 5.3
JUMLAH PENGANGGURAN WILAYAH SULAWESI TAHUN 2006—2008



Sumber : Badan Pusat Statistik (diolah)

Perkembangan tingkat kemiskinan di wilayah Sulawesi selama periode 2007—2009 cenderung menurun. Namun, kecuali Provinsi Sulawesi Utara dan Sulawesi Selatan, tingkat kemiskinan semua provinsi di wilayah Sulawesi masih lebih tinggi daripada tingkat kemiskinan nasional sebesar 14,2 persen. Gambaran secara lengkap persentase kemiskinan di wilayah Sulawesi dapat dilihat pada Tabel 5.3 sebagai berikut.

TABEL 5.3
PERSENTASE KEMISKINAN WILAYAH SULAWESI TAHUN 2007—2009

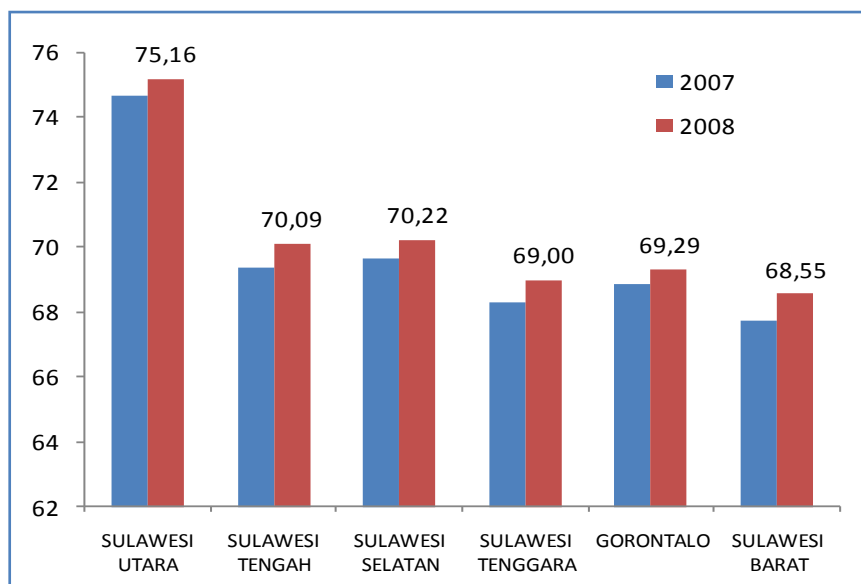
Provinsi	2007	2008	2009
Sulawesi Utara	11,4	10,1	9,8
Gorontalo	27,4	24,9	25,0
Sulawesi Tengah	22,4	20,8	19,0
Sulawesi Selatan	14,1	13,3	12,3
Sulawesi Tenggara	21,3	19,5	18,9
Sulawesi Barat	19,0	16,7	15,3

Sumber : Badan Pusat Statistik

Indeks pembangunan manusia (IPM) tahun 2007—2008 menunjukkan

perbaiki untuk setiap provinsi di wilayah Sulawesi. Dari 6 (enam) provinsi yang ada di wilayah Sulawesi, hanya Provinsi Sulawesi Utara yang memiliki nilai IPM lebih tinggi dari nilai IPM nasional. Meskipun terdapat peningkatan nilai IPM dari tahun 2007 ke tahun 2008, hanya Provinsi Sulawesi Barat yang mengalami peningkatan peringkat dari 28 menjadi 27. Secara nasional IPM Provinsi Sulawesi Utara berada pada peringkat ke-2, sementara provinsi lainnya berada di peringkat ke-20 ke bawah. Rendahnya kualitas sumber daya manusia di wilayah Sulawesi disebabkan oleh belum meratanya jangkauan pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan dan rendahnya mutu pelayanan pendidikan dan kesehatan terutama di daerah perdesaan dan pedalaman.

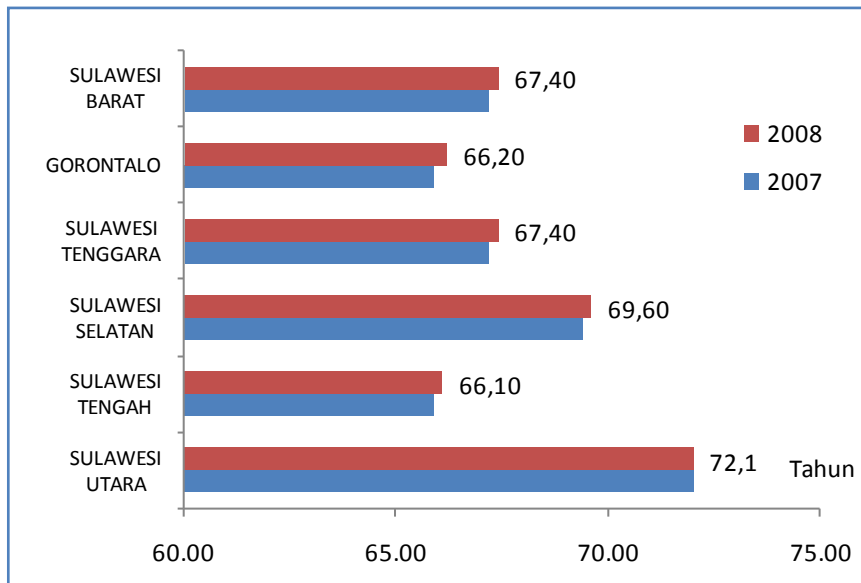
GAMBAR 5.4
INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA WILAYAH SULAWESI
TAHUN 2007—2008



Sumber : Badan Pusat Statistik (diolah)

Di bidang kesehatan, permasalahan akses pelayanan kesehatan tergambar dalam kesenjangan umur harapan hidup antarprovinsi, kondisi geografis wilayah, dan aksesibilitas kawasan perdesaan. Rata-rata penduduk di Provinsi Sulawesi Utara memiliki harapan hidup selama 72 tahun lebih dan secara umum terjadi peningkatan umur harapan hidup hingga 2008. Namun, penduduk di Provinsi Sulawesi Tengah hanya memiliki harapan hidup 66 tahun. Perkembangan Umur Harapan Hidup antarprovinsi di wilayah Sulawesi dapat dilihat pada Gambar 5.5 sebagai berikut.

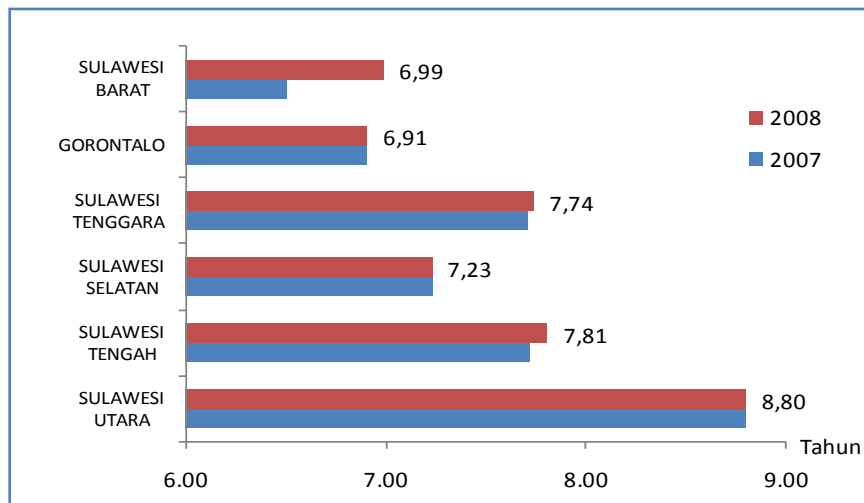
GAMBAR 5.5
UMUR HARAPAN HIDUP WILAYAH SULAWESI TAHUN 2007—2008



Sumber : Badan Pusat Statistik (diolah)

Rata-rata lama sekolah tahun 2008 tertinggi di Sulawesi Utara sebesar 8,8 tahun dan terendah di Gorontalo sebesar 6,91 tahun. Kondisi ini menunjukkan adanya disparitas yang cukup tinggi dari aspek kualitas sumber daya manusia di wilayah Sulawesi, khususnya dalam akses memperoleh layanan pendidikan.

GAMBAR 5.6
RATA-RATA LAMA SEKOLAH WILAYAH SULAWESI TAHUN 2007—2008

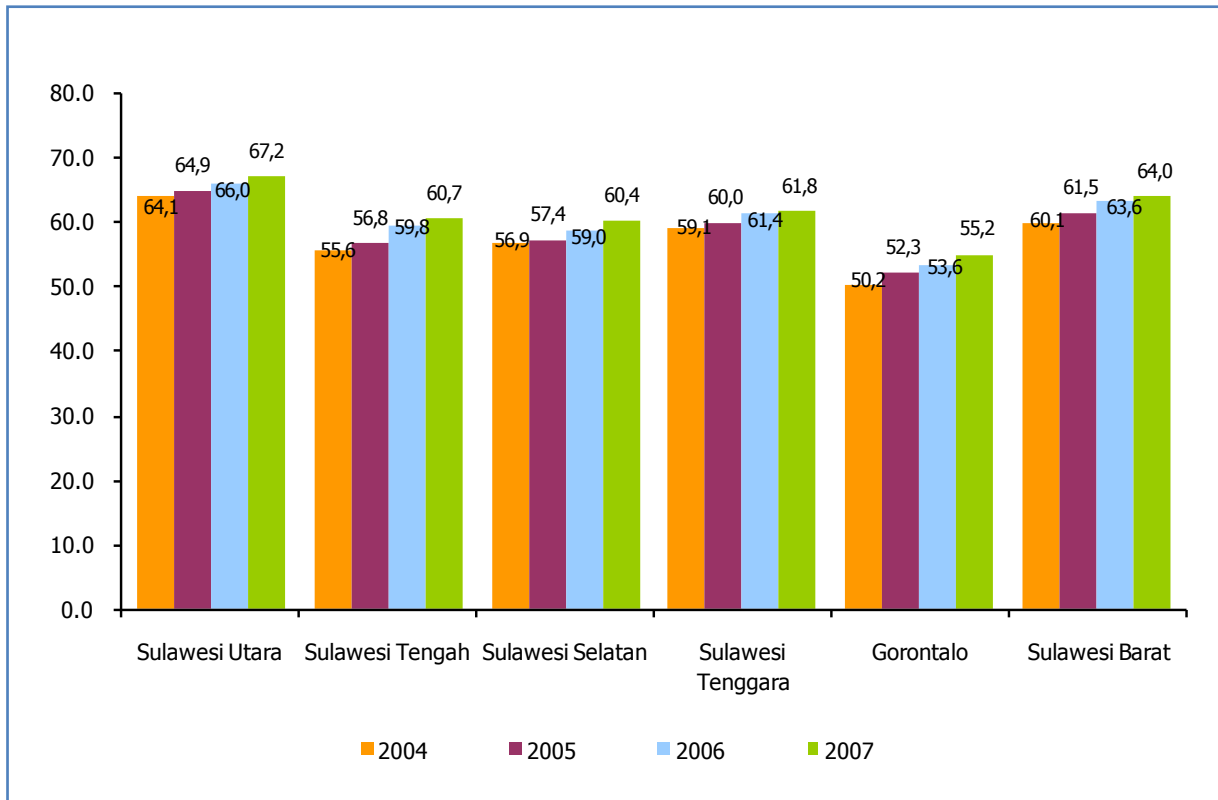


Sumber : Badan Pusat Statistik (diolah)

Indeks pembangunan gender (IPG) (*Gender-related Development Index/GDI*) Indonesia dihitung berdasarkan variabel yang sama dengan IPM menurut jenis kelamin. Di wilayah Sulawesi, IPG tertinggi berada di Provinsi Sulawesi Utara dari setiap provinsi mengalami peningkatan pada tahun 2007. Peringkat sebesar 67,2, sementara nilai IPG di enam provinsi lainnya masih di bawah rata-rata nasional sebesar 65,8. Nilai terendah berada di Provinsi Gorontalo sebesar 55,2, yang disebabkan oleh rendahnya persentase kontribusi dalam pendapatan dan umur harapan hidup (UHH) perempuan. Hal ini menunjukkan masih terjadinya kesenjangan gender antarprovinsi di wilayah Sulawesi.

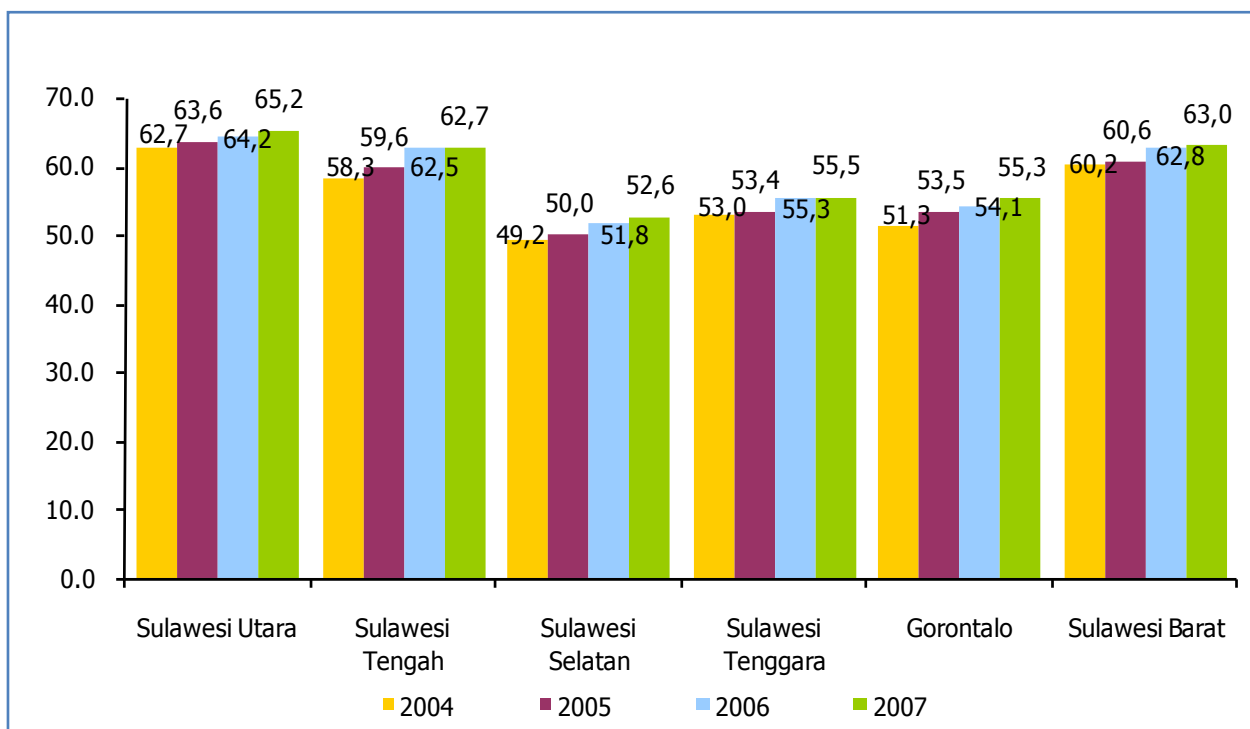
Selain indikator IPG, pembangunan gender juga ditunjukkan dengan indikator *gender empowerment measurement* (GEM) atau indeks pemberdayaan gender (IDG), yang diukur melalui partisipasi perempuan di bidang ekonomi, politik, dan pengambilan keputusan. Di wilayah Sulawesi, IDG tahun 2007 untuk masing-masing provinsi juga mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2006, dengan rata-rata nasional sebesar 62,1. Provinsi Sulawesi Utara berada di peringkat tertinggi dengan nilai 65,2, sedangkan Provinsi Sulawesi Selatan berada di peringkat terendah dengan nilai 52,6. Rendahnya nilai tersebut disebabkan oleh rendahnya keterwakilan perempuan di parlemen, proporsi perempuan dalam pekerjaan profesional, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), dan upah nonpertanian perempuan. Di samping itu, perlindungan perempuan dan anak terutama terhadap berbagai tindak kekerasan juga perlu ditingkatkan dalam lima tahun mendatang.

GAMBAR 5.7
PERKEMBANGAN INDEKS PEMBANGUNAN GENDER WILAYAH SULAWESI TAHUN
2004—2007



Sumber: BPS dan Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan (diolah)

GAMBAR 5.8
PERKEMBANGAN INDEKS PEMBANGUNAN GENDER WILAYAH SULAWESI TAHUN
2004-2007



Sumber: BPS dan Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan (diolah)

Wilayah Sulawesi menghadapi kendala sarana dan prasarana transportasi, antara lain belum meratanya ketersediaan prasarana, kurang memadainya mutu, dan lemahnya integrasi jaringan transportasi multimoda antarwilayah. Dengan letak geografis yang strategis, wilayah Sulawesi berpotensi menjadi hub jaringan transportasi laut antarnegara dan antarpulau dalam rangka mendukung perdagangan luar negeri. Jaringan pelabuhan Makassar, Bitung, Pantoloan, Kendari, Bau-bau, dan Anggrek berperan strategis dalam upaya peningkatan perdagangan, baik di wilayah Sulawesi maupun di kawasan Indonesia timur. Keterkaitan antarwilayah di Sulawesi juga menghadapi hambatan belum optimalnya integrasi jaringan jalan lintas serta belum terintegrasinya jalur penerbangan antarprovinsi.

Wilayah Sulawesi juga menghadapi terbatasnya ketersediaan energi listrik sebagai akibat rendahnya pasokan tenaga listrik. Keterbatasan ini menghambat upaya peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan. Saat ini pasokan energi listrik di wilayah Sulawesi berasal dari sistem kelistrikan Provinsi Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, dan Gorontalo (Sistem Suluttenggo) dan Sistem Kelistrikan Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, dan Provinsi Sulawesi Barat (Sistem Sulserabar).



Rasio elektrifikasi tahun 2007 untuk Provinsi Sulawesi Utara 66,6 persen, Sulawesi Tengah 47,6 persen, Gorontalo 48,7 persen, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat 54,9 persen, serta Sulawesi Tenggara 38,2 persen.

Infrastruktur strategis lainnya adalah irigasi yang penting untuk mendukung peran wilayah Sulawesi sebagai salah satu lumbung pangan nasional. Berdasarkan data tahun 2006, daerah irigasi wilayah Sulawesi sekitar 21 persen dari total daerah irigasi nasional yang tersebar di Sulawesi Selatan sekitar 69 persen, Sulawesi Tengah sekitar 16 persen, Sulawesi Tenggara sekitar 7 persen, Sulawesi Utara sekitar 6 persen, dan Gorontalo sekitar 2 persen.

Wilayah Sulawesi memiliki kekayaan sumber daya alam cukup tinggi berupa hutan, bahan tambang, lahan yang cocok untuk pertanian, serta sumber daya kelautan. Pemanfaatan lahan di wilayah Sulawesi sebagian besar untuk perkebunan. Penggunaan lahan sawah di wilayah Sulawesi seluas 830 ribu Ha, yaitu sekitar 66 persen di Sulawesi Selatan. Potensi bahan tambang meliputi nikel, emas, migas, dan batu gamping/kapur. Pemanfaatan sumber daya mineral pertambangan di Sulawesi sangat potensial bagi perkembangan ekonomi regional. Sementara itu, potensi sumber energi primer untuk pembangkit tenaga listrik yang dimiliki wilayah Sulawesi cukup beragam, yaitu mulai dari minyak bumi, batu bara, air (PLTA, minihidro, dan mikrohidro), dan panas bumi.

Kondisi wilayah Sulawesi dicirikan oleh topografi yang beragam. Sebagian besar wilayah Sulawesi Tengah dan Sulawesi Utara merupakan pesisir, sedangkan Sulawesi Barat berupa daerah perbukitan yang mencakup 52 persen desa. Wilayah berbukit dan bergunung umumnya memiliki karakteristik tidak stabil dan mudah longsor terutama akibat meningkatnya pembukaan hutan. Hal ini terlihat dari kejadian bencana alam dalam tiga tahun terakhir yang didominasi oleh bencana longsor dan angin puting beliung. Di samping itu, kerawanan bencana juga muncul dari aktivitas gunung berapi serta pertemuan subduksi lempeng Indoaustralia dan Eurasia yang memiliki potensi bencana gempa bumi diikuti tsunami.

menunjukkan tren pemulihan yang semakin kondusif dan masyarakat telah kembali beraktivitas secara normal. Tantangan ke depan adalah membangun kesadaran hukum di tingkat masyarakat, meningkatkan kemampuan institusi penegak keamanan dan ketertiban dan merevitalisasi modal sosial yang hidup di tengah masyarakat.

5.1.2 Isu strategis

Dari uraian fakta, potensi, dan permasalahan di wilayah Sulawesi, dapat diidentifikasi beberapa isu strategis di wilayah Sulawesi, yaitu sebagai berikut.

1. **Optimalisasi pengembangan sektor unggulan yang berdaya saing tinggi di wilayah Sulawesi.**

Dominasi sektor-sektor primer dalam perekonomian wilayah Sulawesi menunjukkan belum optimalnya peningkatan nilai tambah sektor dan komoditas unggulan. Padahal keragaman komoditas unggulan antardaerah memungkinkan dikembangkannya gugus (cluster) industri unggulan secara simultan.

2. **Interkonektivitas domestik intrawilayah.**

Integrasi jaringan transportasi domestik sangat strategis dalam mendukung penguatan ketahanan perekonomian domestik. Di samping itu, posisi strategis wilayah Sulawesi memainkan peranan penting bagi penguatan integrasi perekonomian KBI dan KTI.

3. **Kualitas sumberdaya manusia dan tingkat kemiskinan.**

Rendahnya kualitas sumber daya manusia ditunjukkan oleh peringkat IPM provinsi-provinsi di Sulawesi yang berada di bawah 20, kecuali Sulawesi Utara. Tingkat kemiskinan relatif tinggi ditemui di Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Barat.

4. **Kapasitas energi listrik.**

Ketersediaan energi listrik saat ini tidak mampu mengimbangi pertumbuhan permintaan baik dalam jangka pendek maupun panjang. Peningkatan kapasitas energi listrik sangat strategis dalam menunjang arah pengembangan gugus industri unggulan di wilayah Sulawesi.

5. **Revitalisasi modal sosial.**

Peningkatan rasa saling percaya di antara masyarakat dan antara masyarakat dan pemerintah berperan penting dalam meningkatkan efektivitas program-program pembangunan. Meningkatnya rasa saling percaya juga berperan memperlancar kerja sama produktif, mengurangi biaya transaksi, dan memperkuat ketahanan sosial masyarakat dalam menghadapi isu-isu sensitif.

6. **Pembangunan kawasan perbatasan dan pulau-pulau terpencil.**

Pengamanan kawasan perbatasan dengan negara Filipina sangat penting mengingat tingginya potensi konflik di bagian Mindanao selatan. Keterisolasian dan kesenjangan tingkat kesejahteraan di kawasan perbatasan juga berpotensi mengikis nasionalisme masyarakat yang selanjutnya bisa mengancam kedaulatan wilayah nasional.

7. Reformasi birokrasi dan tata kelola.

Aparat pemerintah daerah yang profesional disertai pelayanan publik yang prima berpotensi meningkatkan daya tarik daerah di mata investor, baik lokal maupun asing. Selanjutnya, meningkatnya investasi akan meningkatkan penyerapan tenaga kerja. Pelayanan publik yang efisien juga mengurangi beban pengeluaran rumah tangga miskin.

8. Konservasi sumber daya alam dan lingkungan hidup serta mitigasi bencana.

Wilayah Sulawesi dikaruniai keragaman hayati yang cukup tinggi dan unik yang berbeda dengan flora dan fauna baik di Asia maupun Australia. Pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan yang berlebihan dapat mengancam potensi tersebut. Di sisi lain, wilayah ini memiliki kerawanan bencana terkait aktivitas gunung berapi dan pergerakan lempeng bumi.

5.2 Arah Pengembangan Wilayah

Dengan memperhatikan rancangan Rencana Tata Ruang Wilayah Pulau Sulawesi, pengembangan wilayah Sulawesi diarahkan untuk: (1) mendorong perkembangan peran Pulau Sulawesi sebagai salah satu wilayah yang memiliki peluang eksternal cukup besar; (2) mengembangkan komoditas unggulan Pulau Sulawesi yang memiliki daya saing tinggi melalui kerja sama lintas sektor dan lintas wilayah provinsi dalam pengelolaan dan pemasarannya; (3) memprioritaskan kawasan tertinggal dan kawasan perbatasan dalam rangka pencapaian pemerataan tingkat perkembangan antarwilayah, termasuk pengembangan pulau-pulau kecil dan gugus kepulauan; (4) memanfaatkan potensi sumber daya di darat dan laut secara optimal serta mengatasi potensi konflik lintas wilayah provinsi yang terjadi di beberapa wilayah perairan dan daratan; (5) mempertahankan keberadaan sentra-sentra produksi pangan nasional, khususnya bagi sawah beririgasi teknis dari ancaman konversi lahan; (6) memantapkan keterkaitan antara kawasan andalan dan kawasan budi daya lainnya berikut kota-kota pusat kegiatan di dalamnya, dengan kawasan dan pusat-pusat pertumbuhan antarpulau di wilayah nasional, serta dengan pusat-pusat pertumbuhan di kawasan sub-regional ASEAN, Asia Pasifik, dan kawasan internasional lainnya dalam menciptakan daya saing wilayah; (7) mempertahankan dan merehabilitasi kawasan lindung hingga mencapai luasan minimal 40 persen dari luas keseluruhan Pulau Sulawesi dalam rangka mengurangi risiko dampak bencana lingkungan yang dapat mengancam keselamatan

masyarakat dan aset sosial-ekonominya, baik yang berbentuk prasarana, pusat permukiman maupun kawasan budi daya; (8) meningkatkan upaya pengembangan dan pelestarian kesenian daerah; (9) meningkatkan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda; (10) memperluas pengerahan tenaga terdidik untuk pembangunan perdesaan; (11) meningkatkan upaya pemasyarakatan dan pembinaan olahraga; (12) meningkatkan upaya pembinaan olahraga yang bersifat nasional; (13) meningkatkan kerja sama pola kemitraan untuk pembangunan sarana dan prasarana olahraga; (14) mengembangkan industri pengolahan yang berbasis pada sektor kelautan, pertanian, perkebunan, pertambangan, dan kehutanan secara berkelanjutan; serta (15) mengembangkan pemanfaatan ruang untuk mewadahi dinamika kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya.

Pengembangan sistem pusat permukiman di wilayah Sulawesi ditekankan pada terbentuknya fungsi dan hirarki pusat permukiman sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional yang meliputi Pusat Kegiatan Nasional (PKN), Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), Pusat Kegiatan Lokal (PKL) dan Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) di kawasan perbatasan negara. Pengembangan PKN di Pulau Sulawesi diarahkan untuk: (1) mendorong optimalisasi pengembangan kawasan perkotaan Mamminasata (Makassar–Maros–Sungguminasa–Takalar) dan Manado–Bitung sebagai pusat pelayanan primer yang sesuai dengan daya dukung lingkungannya, (2) mendorong pengembangan kota-kota Gorontalo, Palu, dan Kendari sebagai pusat pelayanan sekunder.

Pengembangan PKW di Pulau Sulawesi diarahkan untuk: (1) mendorong pengembangan kota-kota Tomohon, Kotamobagu, Tondano, Isimu, Marisa, Kwandang, Luwuk, Pare-pare, Kolonodale, Palopo, Watampone, Bulukumba, Jeneponto, Pangkajene, Barru, Lasolo, Rarowatu, Raha, Baubau, dan Kolaka sebagai pusat pelayanan sekunder; (2) mengendalikan pengembangan kota-kota Mamuju, Poso, Buol, Donggala, Toli-Toli, Tondano, dan Unaha sebagai pusat pelayanan sekunder sesuai dengan daya dukung lingkungannya. Pengembangan PKL di Pulau Sulawesi diarahkan ditetapkan melalui peraturan daerah provinsi berdasarkan usulan pemerintah kabupaten/kota dengan kriteria sebagaimana ditetapkan dalam RTRWN. Pengembangan PKSN di kawasan perbatasan negara diarahkan pada pengembangan kota Melonguane dan Tahuna.

5.3 Tujuan dan Sasaran Pengembangan Wilayah

Berdasarkan arahan pengembangan wilayah Sulawesi, tujuan pembangunan wilayah Sulawesi dalam kurun waktu 2010—2014, adalah:

1. meningkatkan standar hidup masyarakat di wilayah Sulawesi;
2. meningkatkan produksi dan produktivitas sektor pertanian, perkebunan, perikanan dan pertambangan di wilayah Sulawesi;

3. meningkatkan ketersediaan, kualitas, dan jangkauan pelayanan prasarana dan sarana transportasi, baik darat, laut, maupun udara;
4. meningkatkan jumlah, mutu dan jangkauan sistem jaringan prasarana dasar (jalan, pelabuhan, lapangan udara, telekomunikasi, listrik dan telepon);
5. meningkatkan aksesibilitas masyarakat wilayah Sulawesi terhadap pelayanan publik dasar;
6. mewujudkan keseimbangan pembangunan wilayah Sulawesi bagian selatan, Sulawesi bagian tengah dan Sulawesi bagian utara;
7. terwujudnya jati diri dan karakter bangsa yang tangguh dan toleran;
8. meningkatkan peran wilayah Sulawesi sebagai lumbung pangan nasional;
9. meningkatkan kesiapan daerah dalam menghadapi bencana alam;
10. mempertahankan dan merehabilitasi kawasan lindung hingga mencapai luasan minimal 40 persen dari luas wilayah Sulawesi.

Dengan demikian, sasaran pengembangan wilayah Sulawesi pada tahun 2010 – 2014 adalah sebagai berikut.

1. Meningkatnya standar hidup masyarakat wilayah Sulawesi yang ditunjukkan dengan membaiknya berbagai indikator pembangunan, yaitu : pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, pengangguran, angka kematian bayi, angka harapan hidup, serta pendapatan perkapita.
2. Meningkatkan produksi dan produktivitas sektor pertanian, perkebunan, perikanan dan pertambangan di wilayah Sulawesi.
3. Meningkatkan ketersediaan, kualitas, dan jangkauan pelayanan prasarana dan sarana transportasi, baik darat, laut, maupun udara.
4. Meningkatnya jumlah, mutu dan jangkauan sistem jaringan prasarana dasar (jalan, pelabuhan, lapangan udara, telekomunikasi, listrik dan telepon).
5. Meningkatnya aksesibilitas masyarakat wilayah Sulawesi terhadap pelayanan publik dasar.
6. Terwujudnya keseimbangan pembangunan wilayah Sulawesi bagian selatan, Sulawesi bagian tengah dan Sulawesi bagian utara.
7. Terwujudnya jati diri dan karakter bangsa yang tangguh dan toleran, yang antara lain ditandai dengan meningkatnya kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap nilai budaya yang positif dan produktif, serta meningkatnya apresiasi masyarakat terhadap keragaman dan kekayaan budaya.
8. Meningkatnya kontribusi wilayah Sulawesi sebagai lumbung pangan nasional.
9. Meningkatnya kesiapan daerah dalam menghadapi bencana.

10. Mewujudkan kawasan lindung hingga mencapai luas minimal 40 persen dari luas wilayah Sulawesi.

TABEL 5.4
SASARAN PERTUMBUHAN EKONOMI, KEMISKINAN DAN PENGANGGURAN
DI WILAYAH SULAWESI TAHUN 2010—2014

Provinsi	Pertumbuhan Ekonomi (%) ¹⁾		Kemiskinan (%) ²⁾		Pengangguran (%) ³⁾	
	2010	2014	2010	2014	2010	2014
Sulawesi Utara	5,7 – 6,3	7,1 – 7,8	9,17 – 8,86	3,05 – 3,02	9,9 – 11,0	8,2 – 9,0
Sulawesi Tengah	8,5 – 9,0	9,0 – 10,1	17,33 – 16,93	12,09 – 11,96	6,4 – 7,1	5,9 – 6,5
Sulawesi Selatan	6,2 – 7,2	7,5 – 8,3	11,28 -10,87	6,29 -6,04	6,8 – 7,6	4,7 – 5,2
Sulawesi Tenggara	7,5 – 7,9	8,0 – 8,5	17,95 – 17,49	14,14 – 14,01	3,7 – 4,1	2,1 – 2,3
Gorontalo	6,8 – 7,3	7,0 – 8,5	24,13 – 23,98	19,49 -18,56	4,6 – 5,0	2,9 – 3,2
Sulawesi Barat	5,8 – 6,5	6,2 – 7,0	14,06 – 13,93	10,03 - 9,99	4,1 – 4,5	2,7 – 3,0

Sumber : Perhitungan Bappenas;BPS; Susenas;

*Keterangan: ¹⁾ *Pertumbuhan Ekonomi: persentase laju perubahan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).*

²⁾ *Kemiskinan: persentase jumlah penduduk miskin terhadap total jumlah penduduk.*

³⁾ *Pengangguran: persentase jumlah pengangguran terbuka terhadap total angkatan kerja.*

TABEL 5.5
SASARAN ANGKA KEMATIAN BAYI, ANGKA HARAPAN HIDUP,
RATA-RATA LAMA SEKOLAH DAN PENDAPATAN PERKAPITA
DI WILAYAH SULAWESI TAHUN 2010-2014

Provinsi	Angka Kematian Bayi ¹⁾		Rata-Rata Lama Sekolah ²⁾		Angka Harapan Hidup ³⁾		Pendapatan Perkapita (Rp.Ribu) ⁴⁾	
	2010	2014	2010	2014	2010	2014	2010	2014
Sulawesi Utara	12	9	8,96	9,12	74,47	75,42	7,190.51	7,739.39
Sulawesi Tengah	35	31	7,98	8,26	70,28	71,39	6,377.82	7,096.36
Sulawesi Selatan	28	24	8,00	8,80	69,33	70,80	6,102.59	6,938.13
Sulawesi Tenggara	30	25	7,90	8,20	70,28	71,39	5,126.63	5,641.86
Gorontalo	31	26	7,10	7,40	68,28	69,51	2,693.88	2,966.22
Sulawesi Barat	28	24	7,50	8,70	69,82	71,01	3,989.52	4,315.76

Sumber : Perhitungan Bappenas;BPS; Susenas;

*Keterangan: ¹⁾ Angka Kematian Bayi: jumlah bayi yang meninggal sebelum mencapai usia 1 tahun per 1000 kelahiran hidup.

²⁾ Rata-rata Lama Sekolah: rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani.

³⁾ Angka Harapan Hidup: perkiraan lama hidup rata-rata penduduk.

⁴⁾ Pendapatan per kapita: pendapatan regional dibagi dengan jumlah penduduk pada pertengahan tahun.

5.4 Arah Kebijakan dan Strategi Pengembangan

Berdasarkan arah pengembangan, tujuan dan sasaran, serta dengan mempertimbangkan isu strategis wilayah Sulawesi, arah kebijakan dan strategi pengembangan wilayah Sulawesi kurun waktu 2010—2014 adalah sebagai berikut.

1. Pengembangan wilayah Sulawesi sebagai sentra produksi pertanian dan perikanan dan lumbung pangan nasional dilaksanakan dengan strategi:
 - a. meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman pangan dan perkebunan;
 - b. meningkatkan produksi dan efisiensi usaha perikanan tangkap;
2. Pengembangan gugus industri unggulan wilayah, dengan strategi:



- a. mengembangkan Manado-Bitung sebagai pusat industri pengolahan berbasis hasil laut;
 - b. mengembangkan Gorontalo, Palu, Kendari, dan Mamuju sebagai pusat industri pengolahan tanaman pangan dan hortikultura;
 - c. mengembangkan metropolitan Maminasata sebagai pusat industri pengolahan berbasis pertanian dan perkebunan;
3. Pengembangan jalur wisata alam dan budaya dengan strategi memperkuat jalur wisata Toraja-Tomohon-Bunaken dengan Bali.
 4. Pengembangan wilayah Sulawesi sebagai satu kesatuan ekonomi domestik, dengan strategi:
 - a. mengembangkan integrasi sistem jaringan transportasi darat lintas Sulawesi;
 - b. meningkatkan intensitas perhubungan laut;
 - c. meningkatkan integrasi jaringan perhubungan udara.
 5. Pengembangan Sulawesi sebagai hub Kawasan Timur Indonesia, dilaksanakan dengan strategi meningkatkan kapasitas pelayanan pelabuhan Makassar dan Bitung.
 6. Peningkatan kualitas sumber daya manusia, dilaksanakan dengan strategi:
 - a. meningkatkan akses pendidikan dan pelatihan ketrampilan kerja;
 - b. memperluas jangkauan pelayanan kesehatan;
 - c. meningkatkan efektivitas dan sinergi program penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial.
 7. Peningkatan kapasitas dan integrasi sistem jaringan listrik, dilaksanakan dengan strategi:
 - a. meningkatkan kapasitas dan integrasi sistem jaringan listrik;
 - b. diversifikasi sumber energi primer.
 8. Penguatan ketahanan dan harmonisasi masyarakat dilaksanakan dengan strategi:
 - a. memperkuat kelembagaan dan kearifan lokal;
 - b. meningkatkan kerja sama lintas agama, suku, ras, antara pemerintah-masyarakat.
 9. Pembangunan kawasan perbatasan sebagai beranda depan wilayah nasional dengan strategi:

- a. meningkatkan stabilitas keamanan dan ketertiban kawasan perbatasan;
 - b. meningkatkan kegiatan ekonomi lokal dan keterkaitan kawasan perbatasan dengan pusat pertumbuhan terdekat.
10. Penguatan daerah otonom dan kualitas pelayanan publik dengan strategi:
- a. meningkatkan kualitas legislasi dan regulasi;
 - b. meningkatkan penegakan hukum, HAM, dan pemberantasan korupsi;
 - c. meningkatkan kualitas pelayanan publik.
11. Peningkatan daya dukung lingkungan dan mitigasi bencana, dengan strategi:
- a. Meningkatkan kualitas penataan ruang wilayah.
 - b. Meningkatkan penegakan hukum dalam pengendalian pemanfaatan ruang, sumber daya alam dan lingkungan hidup.
 - c. Memperkuat mitigasi bencana.

MATRIK BUKU III RPJMN 2010-2014 WILAYAH SULAWESI
ISU STRATEGIS, ARAH KEBIJAKAN, WILAYAH, STRATEGI PEMBANGUNAN, DAN FOKUS PRIORITAS

ISU STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN	WILAYAH	STRATEGI PENGEMBANGAN	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS
<p>Optimalisasi pengembangan sektor/komoditas unggulan wilayah:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dominasi komoditas primer dengan nilai tambah rendah 	<p>Pengembangan Sulawesi sebagai sentra produksi pertanian dan perikanan serta lumbung pangan nasional</p>	<p>Sulawesi Utara Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Gorontalo Sulawesi Barat</p>	<p>Meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman pangan dan perkebunan</p>	<p>Prioritas Nasional</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan dan kebijakan di bidang pertanahan untuk mendukung UU No 41/2009 • Perluasan areal pertanian di Sulbar, Sulsel, Sulteng, Sultra. • Penertiban, serta optimalisasi penggunaan lahan terlantar. • Pembangunan dan pemeliharaan sarana transportasi dan angkutan yang melayani daerah-daerah sentra produksi pertanian • Pembangunan Jalan Lintas Sulawesi • Pembangunan / peningkatan Jaringan Irigasi. • Rehabilitasi Jaringan Irigasi. • Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi. • Pembangunan / peningkatan Jaringan Rawa. • Rehabilitasi Jaringan Rawa. • Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Rawa. • Pembangunan / peningkatan Jaringan Irigasi Air Tanah. • Rehabilitasi Jaringan Irigasi Air Tanah. • Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Air Tanah • Pembangunan Bendungan Paseloreng di Sulsel. • Rehabilitasi Waduk/Embung Salamekko di Sulsel.

ISU STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN	WILAYAH	STRATEGI PENGEMBANGAN	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS
				<ul style="list-style-type: none"> • Pengelolaan air untuk pertanian • Pembangunan dan pemeliharaan jaringan listrik yang melayani daerah-daerah sentra produksi pertanian • Pembangunan dan pemeliharaan teknologi komunikasi dan sistem informasi nasional yang melayani daerah-daerah sentra produksi pertanian • Penelitian dan pengembangan tanaman pangan, Lokasi: Sulsel. • Penelitian dan pengembangan tanaman perkebunan, Lokasi: Sulut. • Pelaksanaan Penelitian dan Pengkajian Teknologi Pertanian, Lokasi: Sulut, Sulsel • Pengembangan Industri Hilir, Pemasaran serta Pengolahan hasil pertanian • Dorongan untuk investasi pangan, pertanian, dan industri perdesaan berbasis produk lokal oleh pelaku usaha dan pemerintah • Penyediaan pembiayaan yang terjangkau • Sistem subsidi yang menjamin ketersediaan benih varietas unggul yang teruji, pupuk, teknologi dan sarana pasca panen yang sesuai secara tepat waktu, tepat jumlah, dan terjangkau • Pengambilan langkah-langkah konkrit terkait adaptasi dan antisipasi sistem pangan dan pertanian terhadap perubahan iklim
			Meningkatkan produksi dan efisiensi usaha perikanan tangkap dan budidaya	<p>Prioritas Nasional</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan Rencana Zonasi • Revitalisasi Kapal perikanan (yang laik laut, laik tangkap dan laik simpan), alat penangkap ikan (yang sesuai SNI) dan pengawakan yang memenuhi standar di setiap WPP

ISU STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN	WILAYAH	STRATEGI PENGEMBANGAN	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS
				<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan dan pemeliharaan sistem sarpras pembudidayaan ikan (sesuai kebutuhan) • Pengawasan dan penerapan teknologi terapan adaptif perikanan budidaya • Pengembangan teknik budidaya ikan • Pengembangan pokdakan • Pengembangan kawasan minapolitan • Pengembangan KUB • Pengembangan sentra produksi (Sulsel, Sultra, Sulut, Gorontalo) sistem rantai dingin • Pemenuhan kebutuhan benih untuk produksi dan pasar (patin, nila, lele, gurame, mas, rumput laut) • Pengelolaan Sumberdaya Ikan (Gorontalo, Sulsel, Sulteng, Sulut) <p>Prioritas Pulau</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan Kualitas dan Kompetensi Angkatan Kerja bidang perikanan dan perkapalan • Penyediaan fasilitas pembekuan ikan • Pengendalian pemanfaatan sumber daya perikanan untuk mencegah overfishing • Peningkatan kelancaran distribusi energi dan BBM • Peningkatan akses kredit usaha perikanan • Pengamanan wilayah laut nasional dari pencurian kapal asing • Pemberdayaan nelayan skala kecil <p>Prioritas Nasional</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengelolaan Pertanahan Provinsi • Pengelolaan Data dan Informasi Pertanahan • Pengembangan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik
	Pengembangan klaster industri unggulan wilayah	Sulawesi Utara Gorontalo Sulawesi Selatan	Mengembangkan Manado-Bitung sebagai pusat industri pengolahan berbasis hasil laut	

ISU STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN	WILAYAH	STRATEGI PENGEMBANGAN	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS
				<p>(SPIPISE)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Penanaman Modal • Koordinasi Penataan dan Pengembangan Sistem Logistik Nasional • Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan • Penerapan dan penataan sistem logistik nasional di wilayah Sulawesi • Pembangunan Jalan Lintas Sulawesi • Pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan di bidang lalu lintas dan angkutan laut (Pembangunan kapal perintis dan subsidi operasi perintis) : Sulut, Sultra, Sulteng, Sulbar, Gorontalo • Pembangunan dan peningkatan kapasitas pelabuhan utama, pengumpul, dan pengumpan di wilayah Sulawesi antara lain: Bitung, dan Makassar • Peningkatan kapasitas jalan nasional lintas terutama lintas Barat Sulawesi, serta jalan strategis nasional terutama jalan menuju kawasan • Pengelolaan Fasilitas Ekspor dan Impor (Pelabuhan/ bandara internasional di wilayah Sulawesi) • Pengelolaan dan Pembangunan Kegiatan di bidang pelabuhan dan pengerukan (Bitung dan makassar) • Peningkatan kapasitas pembangkit listrik melalui Pembangkit PLTD (Unit/kW) • Peningkatan kapasitas pembangkit listrik melalui Jaringan Transmisi Tenaga Listrik (kms) • Peningkatan kapasitas pembangkit listrik melalui Gardu Induk Transmisi Tenaga Listrik (kms) • Peningkatan kapasitas pembangkit listrik melalui Gardu Distribusi kVA

ISU STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN	WILAYAH	STRATEGI PENGEMBANGAN	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS
			<p>Mengembangkan Gorontalo, Palu, Kendari, Mamuju sebagai pusat industri pengolahan berbasis tanaman pangan dan hortikultura</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kapasitas pembangkit listrik melalui JTM • Peningkatan kapasitas pembangkit listrik melalui JTR • Peningkatan kapasitas PLTP terpasang <p>Prioritas Pulau</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kerjasama pemerintah-swasta • Pengembangan fasilitas pembiayaan dan akses permodalan • Penyediaan infrastruktur energi • Relokasi zona-zona industri ke dalam Kawasan Industri Manado-Bitung. • Mendorong pembangunan fasilitas perkotaan secara kompak di pusat kota dan mengendalikan pembangunan perumahan horizontal. • Menyiapkan dan menetapkan aturan pemintakatan (zoning regulation) untuk alokasi ruang setiap fungsi Kawasan Perkotaan Manado-Bitung. • Pengembangan jaringan prasarana dan sarana kawasan perkotaan • Meningkatkan fungsi jaringan prasarana dan sarana untuk menyiapkan Kawasan Perkotaan Manado-Bitung sebagai pintu gerbang Indonesia dari atau menuju Kawasan Asia Pasifik. <p>Prioritas Nasional:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengelolaan Pertanahan Provinsi • Pengelolaan Data dan Informasi Pertanahan • Pengembangan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) • Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Penanaman Modal • Koordinasi Penataan dan Pengembangan Sistem Logistik Nasional

ISU STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN	WILAYAH	STRATEGI PENGEMBANGAN	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS
			<p>Mengembangkan metropolitan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan Penelitian dan Pengkajian Teknologi Pertanian (Sulut, Sulsel, Sulteng, Sultra, Gorontalo, Sulbar) • Peningkatan kapasitas jalan dan fasilitas jalan bebas hambatan dan perkotaan (Pembanguna jalan akses bandara Gorontalo) • Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan • Penerapan dan penataan sistem logistik nasional di wilayah Sulawesi • Pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan di bidang lalu lintas dan angkutan laut (Pembangunan kapal perintis dan subsidi operasi perintis) : • Peningkatan kapasitas jalan nasional lintas terutama lintas Barat Sulawesi, serta jalan strategis nasional terutama jalan menuju kawasan • Pengelolaan Fasilitas Ekspor dan Impor (Pelabuhan/ bandara internasional di wilayah Sulawesi) • Pembangunan jalan akses menuju bandara Gorontalo • Peningkatan kapasitas pembangkit listrik melalui Pembangkit PLTD (Unit/kW) • Peningkatan kapasitas pembangkit listrik melalui Jaringan Transmisi Tenaga Listrik (kms) • Peningkatan kapasitas pembangkit listrik melalui Gardu Induk Transmisi Tenaga Listrik (kms) • Peningkatan kapasitas pembangkit listrik melalui Gardu Distribusi kVA • Peningkatan kapasitas pembangkit listrik melalui JTM • Peningkatan kapasitas pembangkit listrik melalui JTR • Peningkatan kapasitas PLTP terpasang <p>Prioritas Nasional</p>

ISU STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN	WILAYAH	STRATEGI PENGEMBANGAN	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS
			Maminasata sebagai pusat industri pengolahan berbasis pertanian dan perkebunan	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan dan kebijakan di bidang pertanahan untuk mendukung UU No 41/2009 (5) • Penertiban, serta optimalisasi penggunaan lahan terlantar. • Pengelolaan Pertanahan Provinsi • Pengelolaan Data dan Informasi Pertanahan • Pengembangan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) • Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Penanaman Modal • Koordinasi Penataan dan Pengembangan Sistem Logistik Nasional • Pengembangan Industri Hilir, Pemasaran serta Pengolahan hasil pertanian • Pelayanan Karantina pertanian • Pemantapan sistem penyuluhan pertanian • Pengawasan penyaluran kredit • Pelaksanaan penelitian dan pengembangan Sumberdaya Lahan Pertanian • Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan • Pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan di bidang lalu lintas dan angkutan laut (Pembangunan kapal perintis dan subsidi operasi perintis) : Sulut, Sultra, Sulteng, Sulbar, Gorontalo • Pembangunan dan peningkatan kapasitas pelabuhan utama, pengumpul, dan pengumpan di wilayah Sulawesi antara lain: Bitung, dan Makasar • Peningkatan kapasitas jalan nasional lintas terutama lintas Barat Sulawesi, serta jalan strategis nasional terutama jalan menuju kawasan

ISU STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN	WILAYAH	STRATEGI PENGEMBANGAN	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS
				<ul style="list-style-type: none"> • Pengelolaan Fasilitas Ekspor dan Impor (Pelabuhan/ bandara internasional di wilayah Sulawesi) • Pengelolaan dan Pembangunan Kegiatan di bidang pelabuhan dan pengerukan (Bitung dan Makassar) • Peningkatan kapasitas pembangkit listrik melalui Pembangkit PLTD (Unit/kW) • Peningkatan kapasitas pembangkit listrik melalui Jaringan Transmisi Tenaga Listrik (kms) • Peningkatan kapasitas pembangkit listrik melalui Gardu Induk Transmisi Tenaga Listrik (kms) • Peningkatan kapasitas pembangkit listrik melalui Gardu Distribusi kVA • Peningkatan kapasitas pembangkit listrik melalui JTM • Peningkatan kapasitas pembangkit listrik melalui JTR • Peningkatan kapasitas PLTP terpasang • Pengembangan kapasitas nasional untuk pelaksanaan Penelitian, Penciptaan dan Inovasi dan memudahkan akses dan penggunaannya oleh masyarakat luas <p>Prioritas Pulau</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penguatan struktur industri (revitalisasi industri pengolahan) • Merelokasi zona-zona industri ke dalam Kawasan Industri Makassar. • Menyiapkan dan menetapkan aturan pemintakatan (zoning regulation) untuk alokasi ruang setiap fungsi Kota Mamminasata. • Mendorong pembangunan fasilitas perkotaan secara vertikal dan kompak di pusat kota dan mengendalikan pembangunan perumahan horizontal • Peningkatan kualitas fasilitas investasi

ISU STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN	WILAYAH	STRATEGI PENGEMBANGAN	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS
				<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan akses ke pasar ekspor terutama di kawasan nontradisional • Peningkatan fasilitasi perdagangan luar negeri • Meningkatkan Kualitas dan Kompetensi petani pekebun • Peningkatan akses permodalan • Peningkatan kemampuan pengembangan industri pengolahan komoditi perkebunan • Peningkatan jumlah dan mutu produksi perkebunan • Penyediaan sarana dan prasarana pendukung sentra perkebunan
	Pengembangan jalur wisata alam dan budaya	Sulawesi Utara Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara	Memperkuat keterkaitan jalur wisata Toraja-Tomohon-Bunaken-Wakatobi-Takabonerate- dengan Bali	Prioritas Pulau <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan Promosi destinasi Pariwisata • Pengembangan Destinasi Pariwisata • Pengembangan Industri Pariwisata • Peningkatan kapasitas SDM dalam bidang pariwisata bahari • peningkatan frekuensi penerbangan antara wilayah Sulawesi dan Bali • Penyediaan sarana dan prasarana pendukung pariwisata bahari nasional • Peningkatan Rehabilitasi dan Konservasi ekosistem laut • Pengawasan dan Pengendalian pemanfaatan sumber daya kelautan
Interkonektivitas domestik intrawilayah	Pengembangan wilayah Sulawesi sebagai satu kesatuan ekonomi domestik	Sulawesi Utara Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Gorontalo Sulawesi Barat	Meningkatkan integrasi jaringan transportasi darat lintas Sulawesi	Prioritas Nasional <ul style="list-style-type: none"> • Konsolidasi kebijakan penanganan dan pemanfaatan tanah untuk kepentingan umum secara menyeluruh dibawah satu atap dan pengelolaan tata ruang secara terpadu • Penyelesaian pembangunan Jalan Lintas Sulawesi, sepanjang 3.978,34 km • Penurunan tingkat kecelakaan transportasi • Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Jalan Nasional

ISU STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN	WILAYAH	STRATEGI PENGEMBANGAN	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS
				<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan kebijakan khusus dalam bidang infrastruktur dan pendukung kesejahteraan lainnya yang dapat mendorong pertumbuhan di daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan pasca-konflik
			Meningkatkan intensitas perhubungan laut	<p>Prioritas Nasional</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan jaringan prasarana dan penyediaan sarana transportasi antar moda dan antar pulau yang terintegrasi sesuai dengan sistem transportasi nasional dan cetak biru transportasi multimoda • pembangunan pelabuhan penyeberangan Lokasi: Poso (Sulteng) - Marisa (Gorontalo) • Pembangunan dan Peningkatan kapasitas Pelabuhan Bitung, Makassar serta pelabuhan terpilih lainnya • Ssubsidi perintis dan PSO angkutan laut • Penurunan tingkat kecelakaan transportasi • Pembangunan navigasi dan sistem telekomunikasi pelayaran (VTS,AIS) di wilayah Sulawesi; pengerukan alur pelayaran di Bitung, Makassar • Pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan di bidang lalu lintas dan angkutan laut (Pembangunan kapal perintis dan subsidi operasi perintis) • Pengelolaan dan pembangunan kegiatan di bidang pelabuhan dan pengerukan • Pelaksanaan kebijakan khusus dalam bidang infrastruktur dan pendukung kesejahteraan lainnya yang dapat mendorong pertumbuhan di daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan pasca-konflik
			Meningkatkan integrasi jaringan perhubungan udara	<p>Prioritas Nasional</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan jaringan prasarana dan penyediaan sarana transportasi antar moda dan antar pulau yang terintegrasi sesuai dengan sistem transportasi nasional dan cetak biru transportasi

ISU STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN	WILAYAH	STRATEGI PENGEMBANGAN	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS
				multimoda <ul style="list-style-type: none"> • Subsidi angkutan perintis udara; Pengembangan Peningkatan Sam Ratulangi, Melongguane, Naha, Djalaludin, Mutiara, Bubung, Kasiguncu, Lalos, Pogogul, Syukuran Aminuddin Amir, Seko, Rampi, Soroako, Hasanuddin, Pongtiku, Andi Jemma, Tampa Padang, Tampa Padang, Wolter Monginsidi, Beto Ambari, Sugimanuru • Pembangunan jalan akses menuju bandara Gorontalo • Penurunan tingkat kecelakaan transportasi • Pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan di bidang lalu lintas dan angkutan laut (Pembangunan kapal perintis dan subsidi operasi perintis) • Pengelolaan dan pembangunan kegiatan di bidang pelabuhan dan pengerukan • Pelaksanaan kebijakan khusus dalam bidang infrastruktur dan pendukung kesejahteraan lainnya yang dapat mendorong pertumbuhan di daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan pasca-konflik • Pengentasan daerah tertinggal
	Pengembangan Sulawesi sebagai hub Kawasan Timur Indonesia	Sulawesi Utara Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Gorontalo Sulawesi Barat	Meningkatkan kapasitas pelayanan pelabuhan Makassar dan Bitung	Prioritas nasional <ul style="list-style-type: none"> • Penerapan dan penataan sistem logistik nasional di wilayah Sulawesi • Pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan di bidang lalu lintas dan angkutan laut (Pembangunan kapal perintis dan subsidi operasi perintis) : Sulut, Sultra, Sulteng, Sulbar, Gorontalo • Pembangunan dan peningkatan kapasitas pelabuhan utama, pengumpul, dan pengumpan di wilayah Sulawesi antara lain: Bitung, dan Makasar • Pengelolaan Fasilitas Ekspor dan Impor di Pelabuhan • Pengelolaan dan Pembangunan Kegiatan di bidang pelabuhan dan pengerukan (Bitung dan

ISU STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN	WILAYAH	STRATEGI PENGEMBANGAN	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS
				makassar)
Kualitas sumber daya manusia dan tingkat kemiskinan	Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Sulawesi Utara Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Gorontalo Sulawesi Barat	Meningkatkan akses pendidikan dan pelatihan keterampilan kerja	Prioritas Nasional <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan APM Pendidikan Dasar, Menengah dan SMA • Pemantapan/ rasionalisasi implementasi BOS • Penurunan harga buku standar di tingkat sekolah dasar dan menengah • Penyediaan sambungan internet ber-content pendidikan ke sekolah tingkat menengah selambat-lambatnya 2012 dan terus diperluas ke tingkat sekolah dasar • Peningkatan APK Pendidikan Tinggi • Penyesuaian sistem Ujian Akhir Nasional pada 2011 • Penyempurnaan kurikulum sekolah dasar-menengah sebelum tahun 2011 yang diterapkan di 25% sekolah pada 2012 dan 100% pada 2014 • Pemberdayaan peran Kepala Sekolah sebagai manager sistem pendidikan yang unggul • Revitalisasi peran Pengawas Sekolah sebagai entitas quality assurance • Mendorong aktivasi peran Komite Sekolah untuk menjamin keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses pembelajaran • Mendorong aktivasi peran Dewan Pendidikan di tingkat kabupaten • Penataan ulang kurikulum sekolah yang dibagi menjadi kurikulum tingkat nasional, daerah, dan sekolah dengan memasukkan pendidikan kewirausahaan • Program remediasi kemampuan mengajar guru • Penerapan sistem evaluasi kinerja profesional tenaga pengajar • Sertifikasi ISO 9001:2008 • Peningkatan kerjasama PTN dengan lembaga pendidikan internasional

ISU STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN	WILAYAH	STRATEGI PENGEMBANGAN	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS
				<ul style="list-style-type: none"> • Mendorong 11 PT masuk Top 500 THES pada 2014 • Peningkatan perbandingan guru:murid • Memastikan tercapainya Standar Nasional Pendidikan (SNP) bagi Pendidikan Agama dan Keagamaan paling lambat tahun 2013 • Layanan Jasa Perpustakaan dan Informasi • Pengembangan Perpustakaan dan Pengkajian Minat Baca <p>Prioritas Pulau</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan pendidikan vokasional • Penyelenggaraan Pendidikan Keaksaraan Fungsional • Pemberian insentif bagi tenaga pendidik di daerah pedalaman dan pulau-pulau terdepan/terpencil • Pengembangan lembaga pendidikan berbasis pertanian, perkebunan, dan kelautan
			Memperluas jangkauan pelayanan kesehatan	<p>Prioritas Nasional</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak • Pemberian imunisasi dasar kepada balita • Penyediaan akses sumber air bersih • Peningkatan akses sanitasi dasar berkualitas • Pemberlakuan Daftar Obat Esensial Nasional (DOEN) sebagai dasar pengadaan obat di seluruh Indonesia dan pembatasan harga obat generik bermerek pada tahun 2010 • Perluasan Asuransi Kesehatan Nasional melalui : i) Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat

ISU STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN	WILAYAH	STRATEGI PENGEMBANGAN	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS
			<p>Meningkatkan efektifitas dan sinergi program penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial</p>	<p>Miskin di Puskesmas; ii) Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin di Rumah Sakit; iii) Dukungan Manajemen Pengelolaan, Pembinaan, dan Pengembangan Jaminan Kesehatan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kualitas dan jangkauan layanan KB melalui klinik pemerintah dan swasta melalui: i) Pembinaan kesertaan ber KB; ii) Penguatan Sumberdaya Penyelenggara program KB; iii) Peningkatan advokasi pada stakeholder; iv) Peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi pengendalian penduduk dan KB; v) Pengembangan Media Komunikasi; vi) Peningkatan kemitraan dengan lintas sektor dan pemda; viii) Peningkatan kemitraan dengan sektor swasta, LSM, dan masyarakat; viii) Penyediaan data dan informasi program kependudukan dan KB • Penurunan prevalensi Tuberculosis dari 235 menjadi 224 per 100.000 penduduk • Penurunan kasus malaria (Annual Parasite Index-API) dari 2 menjadi 1 per 1.000 penduduk • Pengendalian prevalensi HIV pada populasi dewasa (persen) hingga menjadi < 0,5 • Penurunan prevalensi kekurangan gizi (terdiri dari gizi-kurang dan gizi-buruk) pada anak balita dari 18,4 menjadi <15 persen pada 2014 <p>Prioritas Pulau</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pemberian insentif bagi tenaga medis yang ditempatkan di daerah-daerah tertinggal, terpencil, dan pulau-pulau terdepan • Peningkatan edukasi masyarakat tentang pola hidup sehat • Peningkatan kualitas lingkungan permukiman <p>Prioritas Nasional</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penambahan anggaran PNPM Mandiri dari Rp. 10,3 T pada tahun 2009 menjadi Rp. 12,1 T pada tahun 2010 • Peningkatan koordinasi pelaksanaan program-program perlindungan sosial

ISU STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN	WILAYAH	STRATEGI PENGEMBANGAN	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS
				<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan Kelancaran Distribusi Bahan Pokok Prioritas Pulau <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan efektivitas pelaksanaan dan koordinasi penanggulangan kemiskinan Peningkatan koordinasi dan sinergi program penanggulangan kemiskinan yang dilakukan kementerian, pemerintah daerah, dan swasta (corporate social responsibility)
Kapasitas energi listrik	Peningkatan kapasitas dan integrasi sistem jaringan listrik	Sulawesi Utara Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Gorontalo Sulawesi Barat	Meningkatkan kapasitas dan integrasi jaringan listrik	Prioritas Nasional <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan Kapasitas Pembangkit, Jaringan dan Gardu Transmisi Listrik
			Diversifikasi sumber energi primer	Prioritas Nasional <ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan unit pengolahan Biofuel. • Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman tahunan (Penyediaan Bahan bakar Bio Energi) yaitu Klp Sawit: 0,03 Jt T; Jarak Pagar: 4 Ribu T • Pengembangan tenaga listrik surya dengan daya kecil untuk penerangan, melalui pembuatan Modul tenaga listrik surya daya tertentu Prioritas Pulau <ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan pusat pengolahan biodiesel dari kelapa sawit • Peningkatan dan penyediaan sarana dan prasarana penunjang industri energi terbarukan • Peningkatan kualitas SDM profesional bidang industri energi terbarukan • Peningkatan investasi di bidang energi alternatif terbarukan
Revitalisasi modal sosial	Penguatan ketahanan dan harmonisasi masyarakat	Sulawesi Tengah Sulawesi Barat Sulawesi Selatan	Memperkuat kelembagaan dan kearifan lokal/tradisional	Prioritas Nasional <ul style="list-style-type: none"> • Penelitian dan Pengembangan Bidang Kebudayaan (Bd) • Pelestarian dan Pengembangan Kesenian Prioritas Pulau

ISU STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN	WILAYAH	STRATEGI PENGEMBANGAN	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS
			Meningkatkan kerjasama lintas agama, suku, ras, antara pemerintah-masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • Pemberdayaan lembaga keswadayaan masyarakat • Penguatan lembaga adat dan nilai-nilai luhur adat <p>Prioritas Nasional</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan kebijakan khusus dalam bidang infrastruktur dan pendukung kesejahteraan lainnya yang dapat mendorong pertumbuhan di daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan pasca-konflik <p>Prioritas Pulau</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan Budaya Harmonis • Peningkatan kerjasama dan dialog antar lembaga keswadayaan masyarakat, antara pemerintah dan lembaga keswadayaan masyarakat, dan antar umat beragama • Peningkatan partisipasi seluruh unsur masyarakat dalam perencanaan dan perumusan kebijakan
Pembangunan kawasan perbatasan dan pulau-pulau terpencil	Pengembangan kawasan perbatasan sebagai beranda depan wilayah nasional	Sulawesi Utara	Meningkatkan stabilitas keamanan dan ketertiban kawasan perbatasan	<p>Prioritas Nasional</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan kebijakan khusus dalam bidang infrastruktur dan pendukung kesejahteraan lainnya yang dapat mendorong pertumbuhan di daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan pasca-konflik • Pembentukan kerjasama dengan negara-negara tetangga dalam rangka pengamanan wilayah dan sumber daya kelautan • Penyelesaian pemetaan wilayah perbatasan RI dengan Malaysia, Papua Nugini, Timor Leste, dan Filipina pada 2010 • Koordinasi pengembangan urusan penataan ruang dan pengembangan wilayah <p>Prioritas Pulau</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan sarana dan prasarana pertahanan dan keamanan

ISU STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN	WILAYAH	STRATEGI PENGEMBANGAN	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS
			Meningkatkan kegiatan ekonomi lokal dan keterkaitan kawasan perbatasan dengan pusat pertumbuhan terdekat	<p>Prioritas Nasional</p> <ul style="list-style-type: none"> • Integrasi Program Perlindungan Sosial berbasis keluarga (PKH, bantuan pangan, jamkesmas, beasiswa anak keluarga berpendapatan rendah, PAUD) • Penambahan anggaran PNPB Mandiri dari Rp. 10,3 T pada tahun 2009 menjadi Rp. 12,1 T pada tahun 2010*) • Penataan regulasi untuk menjamin kepastian hukum atas lahan pertanian • Pembangunan dan pemeliharaan jaringan listrik yang melayani daerah-daerah sentra produksi pertanian demi peningkatan kuantitas dan kualitas produksi • Pembangunan dan pemeliharaan teknologi komunikasi dan sistem informasi nasional yang melayani daerah-daerah sentra produksi pertanian demi peningkatan kuantitas dan kualitas produksi serta kemampuan pemasarannya • Dorongan untuk investasi pangan, pertanian, dan industri perdesaan berbasis produk lokal oleh pelaku usaha dan pemerintah • Penyediaan pembiayaan yang terjangkau • Sistem subsidi yang menjamin ketersediaan benih varietas unggul yang teruji, pupuk, teknologi dan sarana pasca panen yang sesuai secara tepat waktu, tepat jumlah, dan terjangkau • Pembangunan jaringan prasarana dan penyediaan sarana transportasi antar moda dan antar pulau yang terintegrasi sesuai dengan sistem transportasi nasional dan cetak biru transportasi multimoda • Penurunan tingkat kecelakaan transportasi • Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya • Penyediaan Jasa Telekomunikasi

ISU STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN	WILAYAH	STRATEGI PENGEMBANGAN	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS
				<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan Deregulasi Kebijakan • Pengembangan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) • Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Penanaman Modal • Administrasi Badan Hukum • Revitalisasi Pasar Tradisional • Koordinasi Penataan dan Pengembangan Sistem Logistik Nasional • Pengembangan dan penetapan sistem logistik nasional yang menjamin kelancaran arus barang dan mengurangi biaya transaksi/ekonomi biaya tinggi • Pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan di bidang lalu lintas dan angkutan laut (Pembangunan kapal perintis dan subsidi operasi perintis) • Pengelolaan dan pembangunan kegiatan di bidang pelabuhan dan pengerukan • Koordinasi pengembangan dan penerapan sistem National Single Window/NSW dan ASEAN Single Window/ASW • Koordinasi pengembangan urusan penataan ruang dan pengembangan wilayah • Penetapan kebijakan energi yang memastikan penanganan energi nasional yang terintegrasi sesuai dengan Rencana Induk Energi Nasional • Peningkatan kapasitas pembangkit listrik melalui Pembangkit PLTD (Unit/kW) • Peningkatan kapasitas pembangkit listrik melalui Jaringan Transmisi Tenaga Listrik (kms) • Peningkatan kapasitas pembangkit listrik melalui Gardu Induk Transmisi Tenaga Listrik (kms) • Peningkatan kapasitas pembangkit listrik melalui Gardu Distribusi kVA

ISU STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN	WILAYAH	STRATEGI PENGEMBANGAN	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS
				<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kapasitas pembangkit listrik melalui JTM • Peningkatan kapasitas pembangkit listrik melalui JTR • Peningkatan kapasitas PLTP terpasang • pelaksanaan Survei Umum di Wilayah Terbuka • Pengembangan Energi Alternatif <ul style="list-style-type: none"> (i) Listrik Desa (EBT) (ii) PLTS 50 Wp Tersebar (iii) PLTS Terpusat 15 kW (iv) PLTMH (kW) (v) PLT Angin (kW) (vi) Pembangunan unit pengolahan Biofuel (vii) Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman tahunan (Penyediaan Bahan bakar Bio Energi) • Pelaksanaan kebijakan khusus dalam bidang infrastruktur dan pendukung kesejahteraan lainnya yang dapat mendorong pertumbuhan di daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan pasca-konflik • Pengentasan daerah tertinggal <p>Prioritas Pulau</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan keterkaitan daerah/wilayah tertinggal dan terpencil dengan pusat-pusat pertumbuhan wilayah (Ambon, Ternate dan Sofifi) • Pembangunan jalan di pulau-pulau terpencil dan pulau terluar • Pengembangan jalur pelayaran perintis • Introduksi teknologi tepat guna

ISU STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN	WILAYAH	STRATEGI PENGEMBANGAN	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS
Reformasi birokrasi dan tata kelola	Penguatan daerah otonom dan kualitas pelayanan publik	Sulawesi Utara Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Gorontalo Sulawesi Barat	Meningkatkan kualitas legislasi dan regulasi	Prioritas Nasional <ul style="list-style-type: none"> • Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan • Penataan Produk Hukum dan Pelayanan Bantuan Hukum Departemen • Peningkatan pemetaan terhadap publikasi peraturan perundang-undangan daerah oleh penda dalam sistem informasi yang akurat dan up to date • Percepatan harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan di tingkat Pusat dan daerah hingga tercapai keselarasan arah dalam implementasi pembangunan. • Pelaksanaan harmonisasi peraturan perUUan terkait dengan otonomi daerah, baik di Pusat maupun antara Pusat dan Daerah dalam rangka reformasi regulasi secara bertahap. • Pelaksanaan dokumentasi hasil evaluasi PDRD dan rekomendasi kebijakan untuk Depdagri • Pembinaan administrasi pejabat negara di daerah dan DPRD • Pendidikan dan pelatihan Bidang Pemerintahan dan Politik • Penataan Produk Hukum dan Pelayanan Bantuan Hukum Departemen • Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan • Penataan Produk Hukum dan Pelayanan Bantuan Hukum Departemen Prioritas Pulau <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan Kinerja Kelembagaan Demokrasi • Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik
			Meningkatkan penegakan hukum, HAM, dan pemberantasan korupsi	Prioritas Nasional <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan efektifitas pemanfaatan DAK sesuai Petunjuk Pelaksanaan • Optimalisasi penyerapan DAK oleh Daerah • Peningkatan kualitas belanja daerah dalam APBD

ISU STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN	WILAYAH	STRATEGI PENGEMBANGAN	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS
				<ul style="list-style-type: none"> • Penetapan APBD tepat waktu • Penerapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) berstatus Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Provinsi dan kabupaten/ kota • Peningkatan peran Provinsi melakukan fasilitasi kepada kab/kota agar kab/kota memiliki Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) berstatus Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). • Penetapan dan penyampaian Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD secara tepat waktu • Dokumentasi dana transfer
			Meningkatkan kualitas pelayanan publik	<p>Prioritas Nasional</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan kebijakan tentang manajemen kepegawaian (revisi Undang-Undang Pokok Kepegawaian Negara- UU No.8 Thn 1974 Jo. UU NO.43 Thn 199 dan peraturan pelaksanaannya). • Penyusunan kebijakan tentang sistem rekrutmen dan pengadaan pegawai • Penyusunan kebijakan tentang pola karir dan penilaian kinerja PNS • Penyusunan kebijakan Pejabat Eksekutif Senior (Senior Executive Services) • Penyusunan kebijakan sistem diklat • Penyusunan kebijakan tentang promosi dan mutasi • Penyusunan Undang-undang tentang Remunerasi Pejabat Negara dan peraturan pelaksanaannya • Penyusunan kebijakan tentang remunerasi dan tunjangan kinerja Pegawai Negeri yang adil, layak, dan berbasis kinerja;

ISU STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN	WILAYAH	STRATEGI PENGEMBANGAN	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS
				<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan kebijakan sistem pensiun Pegawai Negeri yang layak; • Penyusunan kebijakan tentang asuransi kesehatan dan asuransi pendidikan yang memadai bagi pegawai negeri, keluarga dan putra-putrinya; • Penyusunan kebijakan tentang sistem pengelolaan dana pensiun • Penyelesaian penataan jabatan struktural (Sekretaris Daerah) bagi PNS Pemda
Konservasi sumber daya alam dan lingkungan hidup dan mitigasi bencana alam	Peningkatan daya dukung lingkungan dan mitigasi bencana	Sulawesi Utara Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Gorontalo Sulawesi Barat	Meningkatkan kualitas penataan ruang wilayah	Prioritas Nasional • Koordinasi pengembangan urusan penataan ruang dan pengembangan wilayah
			Meningkatkan penegakan hukum dalam pengendalian pemanfaatan ruang, pemanfaatan SDA dan lingkungan hidup	Prioritas Nasional • Penurunan beban pencemaran lingkungan melalui pengawasan ketaatan pengendalian pencemaran air limbah dan emisi • Penjaminan berjalannya fungsi Sistem Peringatan Dini Cuaca (MEWS) mulai 2010 dan seterusnya
			Memperkuat mitigasi bencana	Prioritas Nasional • Penjaminan berjalannya fungsi Sistem Peringatan Dini Tsunami (TEWS), mulai 2010 dan seterusnya • Penjaminan berjalannya fungsi Sistem Peringatan Dini Cuaca (MEWS) mulai 2010 dan seterusnya • Pengendalian banjir Lokasi: di Gorontalo; Pengendalian lahar/sedimen di Gunung Bawakaraeng provinsi Sulsel • Peningkatan kapasitas aparat pemerintah dan masyarakat dalam usaha pengurangan risiko, mitigasi dan penanganan bencana dan bahaya kebakaran hutan

ISU STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN	WILAYAH	STRATEGI PENGEMBANGAN	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS
				<ul style="list-style-type: none"> • Penyiapan peralatan dan logistik di kawasan rawan bencana • Koordinasi pengembangan urusan penataan ruang dan pengembangan wilayah



BAB VI

PENGEMBANGAN WILAYAH NUSA TENGGARA TAHUN 2010-2014

6.1 Kondisi Wilayah Nusa Tenggara Saat Ini

6.1.1 Capaian Pembangunan Wilayah

Pertumbuhan ekonomi dua provinsi di wilayah Nusa Tenggara dalam lima tahun terakhir cukup berfluktuasi. Selama periode 2004—2008 pertumbuhan ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Barat berkisar 1,7 persen sampai 6,1 persen, dengan rata-rata pertumbuhan 3,3 persen per tahun. Sementara itu pertumbuhan ekonomi Nusa Tenggara Timur berkisar 3,5 persen sampai 5,8 persen per tahun dengan rata-rata 4,86 persen per tahun (**Tabel 6.1**).

TABEL 6.1
PERTUMBUHAN EKONOMI WILAYAH NUSA TENGGARA TAHUN 2004 - 2008
ATAS DASAR HARGA KONSTAN TAHUN 2000 (DALAM PERSEN)

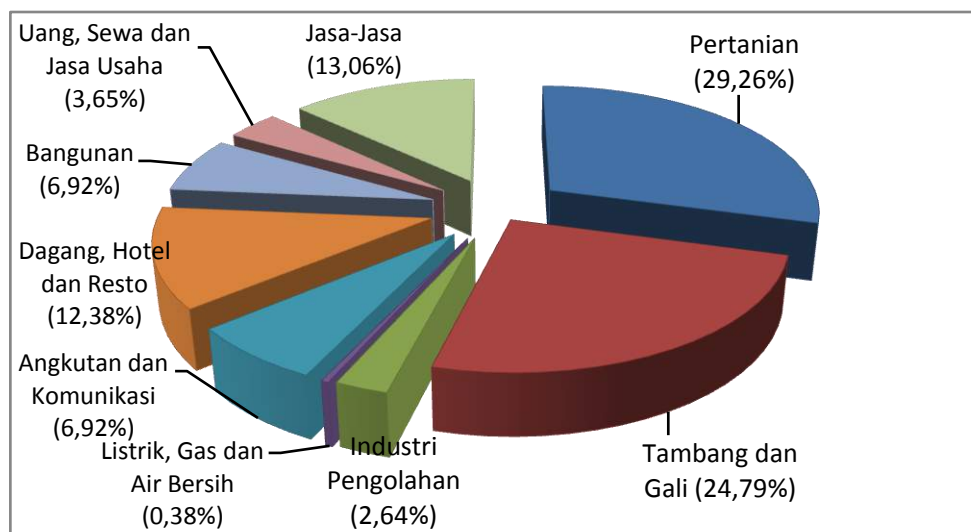
Tahun	Nusa Tenggara Barat	Nusa Tenggara Timur
2004	6,1	5,8
2005	1,7	3,5
2006	2,8	5,1
2007	4,9	5,1
2008	2,1	4,8

Sumber : Badan Pusat Statistik

Pada triwulan 1 tahun 2008, perekonomian di wilayah Nusa Tenggara berdasarkan sektor didominasi oleh sektor pertanian dengan kontribusi sebesar 29,26 persen. Wilayah Nusa Tenggara sesungguhnya memiliki potensi pengembangan yang sangat besar berbasis sumber daya alam terutama peternakan, perikanan, dan wisata bahari. Potensi sumber daya lahan, hutan, dan perkebunan juga cukup besar untuk pengembangan ekonomi wilayah. Pemanfaatan dan pengelolaan berbagai sumber daya tersebut harus mempertimbangkan keterpaduan dan keseimbangan dalam penataan ruang wilayah dalam rangka mencegah eksploitasi yang berlebihan serta mendorong penyebaran dampak perekonomian ke seluruh wilayah. Kontribusi terbesar lainnya

adalah melalui sektor pertambangan dan penggalian dengan kontribusi sebesar 24,79 persen, sektor jasa-jasa sebesar 13,06 persen serta sektor perdagangan, hotel, dan restoran sebesar 12,38 persen (**Gambar 6.1**).

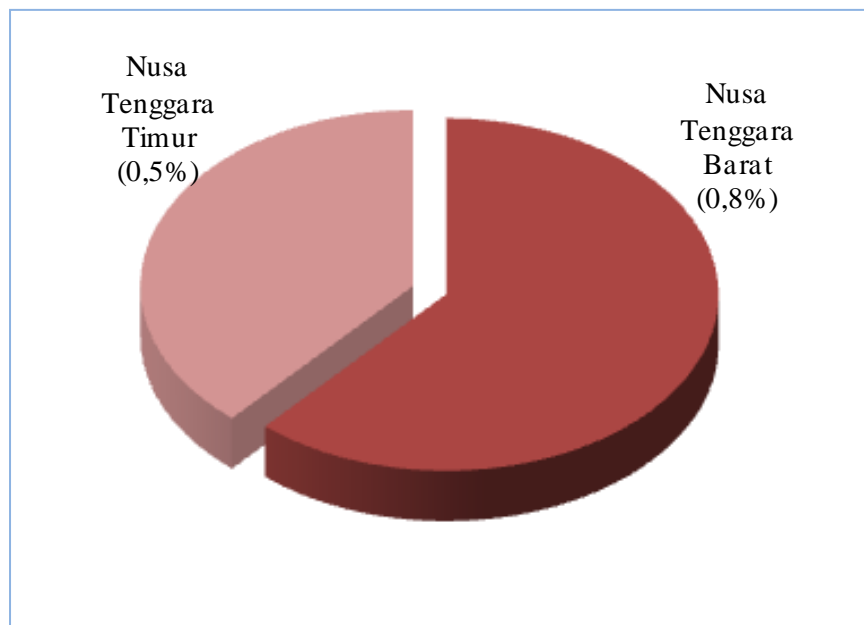
GAMBAR 6.1
KONTRIBUSI EKONOMI WILAYAH NUSA TENGGARA MENURUT SEKTOR ATAS
DASAR HARGA BERLAKU TRIWULAN I TAHUN 2008



Sumber : Badan Pusat Statistik (diolah)

Secara keseluruhan sumbangan wilayah Nusa Tenggara terhadap perekonomian nasional pada tahun 2008 hanya sekitar 1,3 persen, dengan kecenderungan menurun dalam periode lima tahun terakhir. Pada tahun 2004, wilayah Nusa Tenggara menyumbang 1,6 persen dalam perekonomian nasional, dan menurun menjadi 1,4 persen pada tahun 2006. Penurunan peran ini terjadi di Provinsi Nusa Tenggara Barat dari 1,0 persen pada tahun 2004 menjadi 0,8 persen pada tahun 2008, dan di Nusa Tenggara Timur dari 0,6 menjadi 0,5 persen dalam periode yang sama.

GAMBAR 6.2
KONTRIBUSI EKONOMI WILAYAH NUSA TENGGARA TERHADAP EKONOMI NASIONAL ATAS DASAR HARGA BERLAKU TAHUN 2008



Sumber : Badan Pusat Statistik (diolah)

Provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki industri unggulan, yaitu pengolahan rumput laut dan industri berbasis kelautan. Permasalahan yang dihadapi adalah masih rendahnya kualitas dan keterampilan sumber daya manusia; terbatasnya alat penangkapan dan pengolahan hasil laut; terbatasnya modal; lemahnya promosi/pemasaran; terbatasnya kemasan, desain, dan teknologi; dan kurangnya dukungan kebijakan insentif. Sementara itu, komoditas unggulan di Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah pengolahan jagung. Lahan jagung ditanam secara luas, termasuk dengan memanfaatkan lahan tidur. Permasalahan yang dihadapi pada tingkat usaha tani ialah rendahnya produktivitas, berkembangnya hama belalang, belum optimalnya petani dalam merawat tanaman jagung, belum berkembangnya teknologi dan jumlah industri pengolahan jagung, dan relatif rendahnya kualitas jagung karena tingginya kadar air yang dikandungnya. Permasalahan yang muncul dalam pengembangan usaha nonpertanian adalah rendahnya kualitas sumber daya manusia, belum optimalnya penerapan teknologi prapanen dan pascapanen, terbatasnya pengolahan jagung pada skala industri rumah tangga, dan belum tersedianya sarana pergudangan yang memadai.

Komoditas unggulan di Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah pengolahan kakao. Meskipun jumlah luasan perkebunan kakao sangat besar dan terus meningkat,

persentase kakao yang diolah sangat rendah. Permasalahan yang muncul pada tingkat usaha tani adalah produktivitas yang rendah, berkembangnya hama tanaman, rendahnya mutu biji kakao, belum dilakukannya fermentasi, masih dominannya pedagang antarpulau terhadap pedagang biji kakao. Pada tingkat nonpertanian masih muncul permasalahan yaitu belum adanya industri pengolahan serta masih rendahnya kualitas sumber daya manusia.

Kesenjangan wilayah dalam aspek perdagangan ditunjukkan oleh kuatnya hubungan dagang antara Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan wilayah Jawa-Bali. Namun, perdagangan tersebut masih menghadapi hambatan karena kurangnya dukungan prasarana pelabuhan laut, bandar udara, dan terminal bis untuk memperlancar arus masuk dan keluar barang dan manusia. Kesulitan ini semakin dirasakan oleh para pedagang di wilayah pedalaman dan pesisir. Konsekuensinya adalah bahwa perdagangan wilayah Nusa Tenggara lebih didominasi oleh Provinsi Bali dan Provinsi Jawa Timur dalam memasok barang.

Transaksi perdagangan dengan pihak asing di Provinsi Nusa Tenggara Barat jauh lebih tinggi jika dibanding dengan transaksi perdagangan di Nusa Tenggara Timur. Daya tarik investasi di wilayah Nusa Tenggara masih rendah, karena terkait masalah jaminan keamanan. Di sisi lain, Provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki potensi unggulan pariwisata yang dapat menjadi daya tarik investasi. Penanaman modal asing di wilayah Nusa Tenggara lebih terkonsentrasi di Provinsi Nusa Tenggara Barat dibandingkan Nusa Tenggara Timur. Modal asing yang masuk ke Wilayah Nusa Tenggara berkontribusi sebesar 0,1 persen pada tahun 2008, dibandingkan dengan total penanaman modal asing secara nasional.

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Perkapita wilayah Nusa Tenggara terus mengalami peningkatan. Pendapatan perkapita di Provinsi Nusa Tenggara Barat relatif lebih tinggi jika dibandingkan dengan Nusa Tenggara Timur. **(Tabel 6.2)**

TABEL 6.2
PDRB PERKAPITA DENGAN MIGAS WILAYAH NUSA TENGGARA
TAHUN 2004—2008 ATAS DASAR HARGA KONSTAN TAHUN 2000
(DALAM RIBU RUPIAH)

Tahun	Nusa Tenggara Barat	Nusa Tenggara Timur
2004	3,655	2,295
2005	3,659	2,306
2006	3,697	2,376
2007	3,813	2,450
2008	3,850	2,520

Sumber : Badan Pusat Statistik

Pada tahun 2008, jumlah penduduk wilayah Nusa Tenggara yaitu 8,86 juta jiwa, terbagi hampir merata di Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Jumlah penduduk tersebut mencapai sekitar 3,78 persen dari jumlah seluruh penduduk Indonesia. Wilayah Nusa Tenggara merupakan pulau terpadat kedua setelah wilayah Jawa-Bali.

Tingkat pengangguran terendah di kedua provinsi terjadi pada tahun 2008 yaitu masing-masing sebesar 5,48 persen di Provinsi Nusa Tenggara Barat dan 3,84 persen di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Jumlah pengangguran di Provinsi Nusa Tenggara Barat mengalami penurunan, sedangkan jumlah pengangguran di Provinsi Nusa Tenggara Timur mengalami peningkatan. Pada tahun 2008, jumlah pengangguran di Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah sebesar 124 ribu orang dan di Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebesar 81 ribu orang. Gambaran mengenai jumlah pengangguran di wilayah Nusa Tenggara dapat dilihat pada Gambar 6.3 di bawah berikut.

GAMBAR 6.3
JUMLAH PENGANGGURAN WILAYAH NUSA TENGGARA
TAHUN 2006—2008



Sumber : Badan Pusat Statistik (diolah)

Perkembangan penduduk miskin di wilayah Nusa Tenggara dalam kurun waktu 3 tahun (tahun 2007—2009) cenderung mengalami penurunan baik dari jumlah maupun persentasenya. Persentase penduduk miskin di Provinsi Nusa Tenggara Barat pada

tahun 2009 adalah sebesar 22.8 persen, sedangkan di Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah sebesar 23.3 persen.

Jumlah penduduk miskin daerah perdesaan di Provinsi Nusa Tenggara Barat selama kurun waktu 8 tahun (tahun 2000—2008) mengalami penurunan. Sebaliknya, penduduk miskin di daerah perkotaan di Provinsi Nusa Tenggara Barat mengalami peningkatan berdasarkan jumlahnya yang semula berjumlah 340,4 ribu jiwa (tahun 2000) menjadi 560,4 ribu jiwa (tahun 2008).

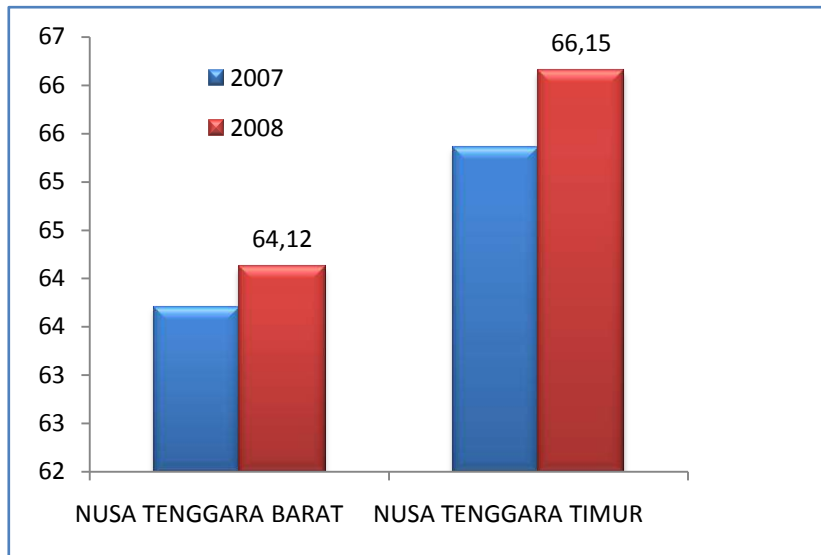
TABEL 6.3
PERSENTASE KEMISKINAN WILAYAH NUSA TENGGARA
TAHUN 2007-2009

Tahun	Nusa Tenggara Barat	Nusa Tenggara Timur
2007	25,0	27,5
2008	23,8	25,7
2009	22,8	23,3

Sumber : Badan Pusat Statistik

Mutu sumber daya manusia di wilayah Nusa Tenggara tergolong menengah ke bawah. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tahun 2008 mencapai 64,12, sedangkan Provinsi Nusa Tenggara Timur mencapai 66,15. Indeks pembangunan manusia di kedua provinsi masih berada di bawah rata-rata nilai IPM secara nasional. **(Gambar 6.4)**

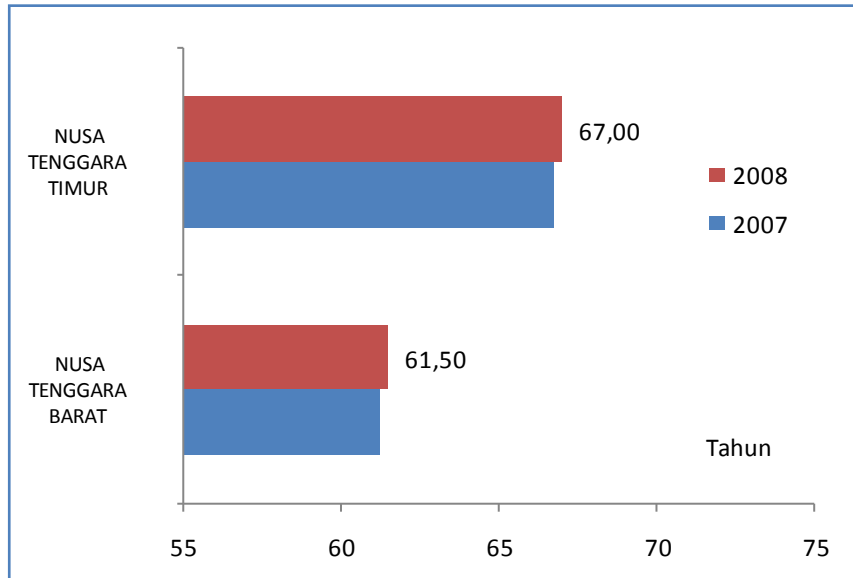
GAMBAR 6.4
INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA WILAYAH NUSA TENGGARA
TAHUN 2007-2008



Sumber : Badan Pusat Statistik (diolah)

Dalam aspek kesehatan, angka Umur Harapan Hidup (UHH) di wilayah Nusa Tenggara masih tergolong rendah. Nilai UHH Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tahun 2008 adalah 61,50 tahun dan nilai UHH Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tahun 2008 adalah 67,00 tahun. Dalam pelayanan kesehatan juga muncul masalah terbatasnya akses layanan kesehatan, khususnya bagi keluarga miskin di daerah terpencil. Wilayah Nusa Tenggara juga sempat ditimpa berbagai penyakit menular. Selain itu, wilayah ini menghadapi masalah rendahnya pemenuhan gizi ibu, bayi, dan balita dari keluarga miskin, serta rendahnya kesadaran perilaku hidup bersih dan sehat. Hal ini diindikasikan oleh tingginya angka kematian bayi. Sementara itu, layanan bidan untuk persalinan masih rendah. Permasalahan ini disebabkan oleh kurang optimalnya pelayanan kesehatan sebagai konsekuensi dari jauhnya letak pusat layanan, kurangnya sarana transportasi, serta kurang memadainya sarana kesehatan dan tenaga kesehatan.

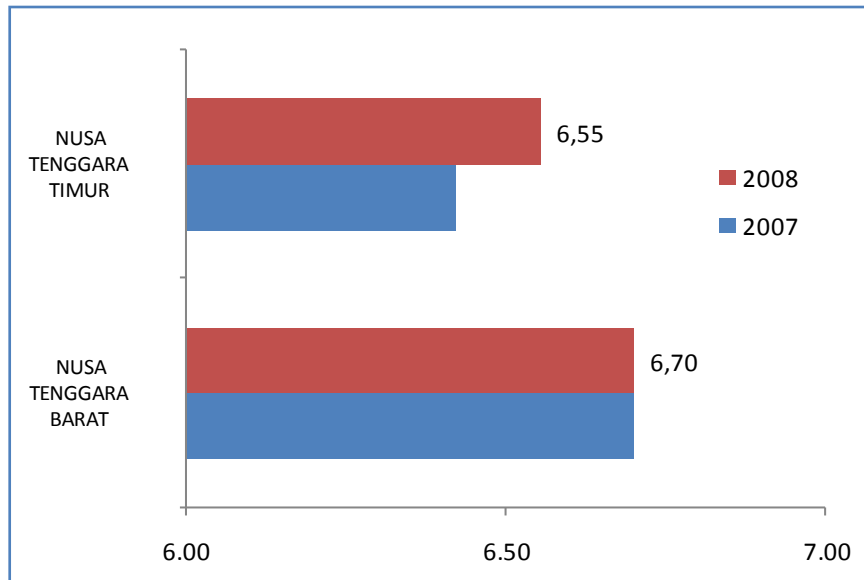
GAMBAR 6.5
UMUR HARAPAN HIDUP WILAYAH NUSA TENGGARA TAHUN 2007-2008



Sumber : Badan Pusat Statistik (diolah)

Di wilayah Nusa Tenggara masih terdapat masalah pendidikan sebagaimana diindikasikan oleh Rata-rata Lama Sekolah (RLS) yang masih rendah. Nilai RLS tahun 2008 di Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah 6,55 tahun dan nilai RLS di Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah 6,70 tahun. Perkembangan angka rata-rata lama sekolah di wilayah Nusa Tenggara dapat dilihat pada Gambar 6.6 sebagai berikut.

GAMBAR 6.6
RATA-RATA LAMA SEKOLAH WILAYAH NUSA TENGGARA
TAHUN 2007-2008

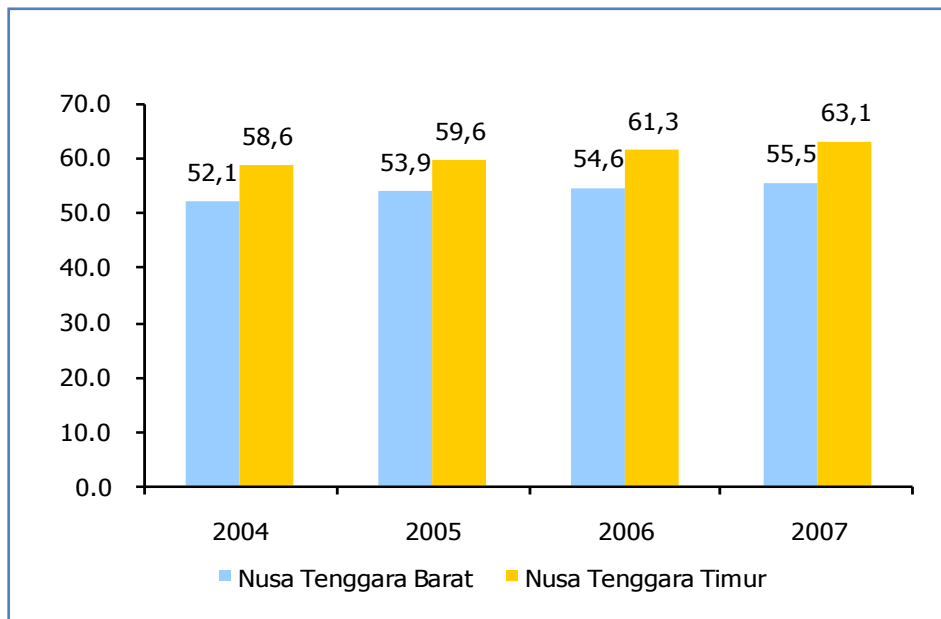


Sumber : Badan Pusat Statistik (diolah)

Selain itu, layanan pendidikan di wilayah Nusa Tenggara masih sulit menjangkau daerah pelosok dan masyarakat pesisir. Kondisi ini menyebabkan rendahnya akses pendidikan di daerah tertinggal, terutama di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Penyebaran guru sekolah dasar juga belum merata dan lebih mengumpul di daerah perkotaan dibandingkan di pedesaan atau daerah terpencil. Persoalan ini mengakibatkan rendahnya kualitas pendidikan, bersama-sama dengan mahalnya biaya pendidikan, belum meratanya jangkauan pelayanan pendidikan, rendahnya mutu pelayanan pendidikan dan rendahnya mutu pendidik.

Demikian juga dengan Indeks Pembangunan Gender (IPG) (*Gender-related Development Index/GDI*) Indonesia, yang dihitung berdasarkan variabel yang sama dengan IPM menurut jenis kelamin. IPG di wilayah Nusa Tenggara mengalami peningkatan pada tahun 2007. Walaupun demikian, nilai tersebut masih di bawah rata-rata nasional sebesar 65,8. IPG di Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar 63,1 dan Nusa Tenggara Barat sebesar 55,5. Rendahnya nilai tersebut disebabkan oleh rendahnya persentase kontribusi dalam pendapatan dan Umur Harapan Hidup (UHH) perempuan. Hal ini menunjukkan masih terjadi kesenjangan gender antarprovinsi di wilayah Nusa Tenggara.

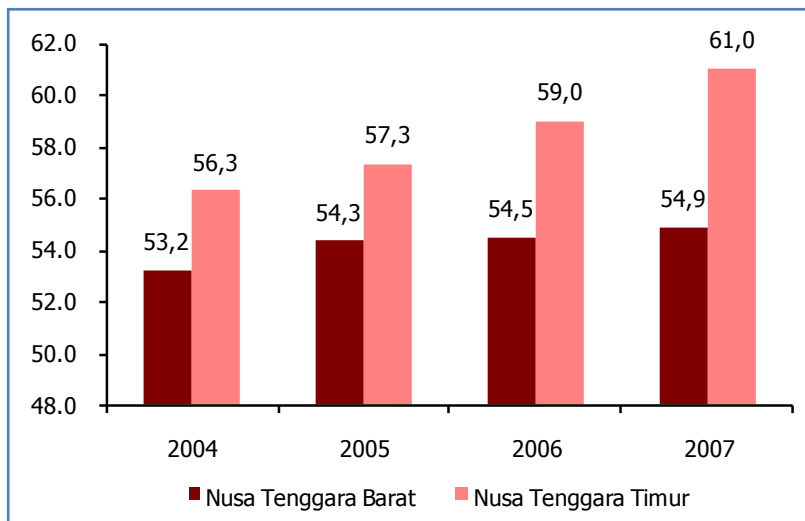
GAMBAR 6.7
PERKEMBANGAN INDEKS PEMBANGUNAN GENDER WILAYAH NUSA TENGGARA
TAHUN 2004-2007



Sumber: BPS dan Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan (diolah)

Selain indikator IPG, pembangunan gender juga ditunjukkan dengan indikator *Gender Empowerment Measurement* (GEM) atau indeks pemberdayaan gender (IDG), yang diukur melalui partisipasi perempuan di bidang ekonomi, politik, dan pengambilan keputusan. Di wilayah Nusa Tenggara, IDG tahun 2007 untuk masing-masing provinsi juga mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2006 meski nilainya masih lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata nasional sebesar 62,1. Nilai IDG untuk Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur masing-masing sebesar 54,9 dan 61,0. Rendahnya nilai tersebut disebabkan oleh rendahnya keterwakilan perempuan di parlemen, proporsi perempuan dalam pekerjaan profesional, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), dan upah nonpertanian perempuan. Di samping itu, upaya-upaya perlindungan perempuan dan anak, terutama terhadap berbagai tindak kekerasan juga perlu ditingkatkan mengingat bahwa hal tersebut merupakan salah satu prioritas lainnya di bidang kesejahteraan rakyat.

GAMBAR 6.8
PERKEMBANGAN INDEKS PEMBERDAYAAN GENDER
WILAYAH NUSA TENGGARA TAHUN 2004-2007



Sumber: BPS dan Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan (diolah)

Wilayah Nusa Tenggara menghadapi permasalahan yang kompleks berkaitan dengan ketertinggalan dan keterisolasian. Upaya pengembangan wilayah masih menghadapi kendala, yaitu rendahnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana yang tersedia, khususnya untuk jalan, jembatan, dan berbagai sarana transportasi terutama di daerah terpencil dan daerah tertinggal. Kendala lain adalah belum terpadunya layanan transportasi antarmoda transportasi darat, laut, sungai, dan udara. Selain itu, wilayah yang tersebar dan dipisahkan oleh perairan mengakibatkan program pembangunan cenderung terpusat pada pulau yang menjadi pusat pemerintahan daerah, serta kurang menyebar ke pulau-pulau lainnya. Pembangunan yang bersifat sektoral dengan memanfaatkan potensi pariwisata, peternakan, dan pertambangan masih cenderung parsial, berjalan sendiri-sendiri, dan kurang terkoordinasi, sehingga tidak mampu menciptakan dampak berganda bagi pengembangan wilayah Nusa Tenggara. Penyediaan pasokan tenaga listrik juga masih menjadi hambatan wilayah Nusa Tenggara terutama disebabkan oleh terbatasnya pasokan dan transmisi tegangan tinggi di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Wilayah yang tersebar juga menghambat mobilitas sumberdaya dan penduduk, sebagai akibat dari minimnya jaringan transportasi di wilayah Nusa Tenggara. Kondisi ini juga menyebabkan rendahnya pengawasan dan pengendalian ketertiban dan keamanan, dan di perbatasan Provinsi Nusa Tenggara Timur memunculkan potensi konflik politik dan keamanan dengan penduduk negara tetangga, Timor Leste. Dengan menyadari kondisi wilayah yang tersebar dan berbagai hambatan yang mengikutinya, perencanaan pembangunan wilayah Nusa Tenggara perlu memperhitungkan secara

sebenarnya karakteristik wilayahnya sebagai satu kesatuan wilayah yang saling berhubungan, termasuk dalam optimalisasi koordinasi dan sinergi berbagai kebijakan dan program pembangunan. Wilayah Nusa Tenggara didominasi oleh kabupaten tertinggal. Ketertinggalan tersebut mencakup rendahnya prasarana dan sarana permukiman serta pendukung ekonomi.

GAMBAR 6.9
DAERAH TERTINGGAL DI WILAYAH NUSA TENGGARA



Sumber : Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal (diolah)

Pembangunan yang berkelanjutan di wilayah Nusa Tenggara masih menghadapi persoalan dalam bentuk perusakan hutan, pembalakan hutan, dan pembakaran hutan. Bencana seperti banjir, longsor dan kekeringan juga muncul, baik sebagai akibat kerusakan lingkungan hidup maupun perubahan iklim global. Sementara itu, pertambangan dan eksploitasi sumber daya alam di darat dan pesisir turut memperparah kerusakan lingkungan. Di sisi lain, wilayah Nusa Tenggara memiliki potensi lahan konservasi baik di darat maupun di laut. Komodo merupakan salah satu warisan dunia, baik untuk kegiatan ilmu pengetahuan maupun kegiatan pariwisata.

GAMBAR 6.10
DAERAH PERBATASAN DI WILAYAH NUSA TENGGARA



Sumber : Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal (diolah)



Di wilayah Nusa Tenggara sempat terjadi eskalasi konflik yang disebabkan oleh krisis ekonomi, politik, sosial budaya, hingga keagamaan. Khusus untuk Provinsi Nusa Tenggara Timur potensi konflik juga muncul di perairan yang berbatasan dengan Timor Leste. Konflik semacam ini berbahaya karena dapat mengancam pertahanan dan keamanan negara, khususnya karena belum ada kesepakatan tentang garis batas laut kedua negara, serta masih adanya eksodus pengungsi dari Timor Leste. Selain itu, masih belum diberlakukan pos lintas batas sehingga terjadi permasalahan pada arus barang dan arus migrasi. Hal ini menjadi salah satu pendorong terjadinya perdagangan ilegal dan kunjungan ilegal oleh masyarakat negeri tetangga.

6.1.2 Isu Strategis

Dari uraian fakta, potensi, dan permasalahan di wilayah Nusa Tenggara, dapat ditarik beberapa isu strategis di wilayah Nusa Tenggara sebagai berikut:

1. **Optimalisasi pengembangan sektor dan komoditas unggulan wilayah.**

Produk unggulan wilayah Nusa Tenggara didominasi oleh komoditas primer dengan nilai tambah kecil. Pengembangan mata rantai industri unggulan yang berbasis komoditas unggulan wilayah selain meningkatkan nilai tambah domestik juga menciptakan lapangan kerja. Hal ini sangat strategis karena wilayah ini merupakan wilayah terpadat kedua secara nasional setelah Jawa-Bali. Kedekatan geografisnya dengan Jawa-Bali juga merupakan peluang terbangunnya koridor pengembangan ekonomi dan pariwisata.

2. **Pembangunan wilayah perbatasan dan kerja sama dengan negara-negara yang berbatasan dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia.**

Wilayah perbatasan dengan negara Timor Leste hingga kini masih menyimpan kerawanan sosial politik dengan tingginya dinamika masyarakat melintasi perbatasan kedua negara. Apabila tidak dikendalikan dengan baik, kerawanan ini bisa berkembang ke arah ketegangan sosial politik yang berpotensi untuk mengganggu hubungan diplomatik. Potensi konflik juga terdapat dalam hal pemanfaatan sumber daya alam di wilayah laut.

Rendahnya interkoneksi domestik pulau-pulau di wilayah Nusa Tenggara. Wilayah Nusa Tenggara yang berbentuk kepulauan masih dilayani oleh prasarana dan sarana perhubungan yang minim. Akibatnya, keterkaitan antarpulau masih lemah. Oleh karena itu, penguatan interkoneksi domestik wilayah sangat strategis dalam upaya memperkuat integrasi perekonomian wilayah, memperlancar perdagangan antarpulau dan mobilitas tenaga kerja, serta meningkatkan skala ekonomi.

3. Kualitas sumberdaya manusia dan tingkat kemiskinan.

Jika merujuk pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2008, kualitas sumber daya manusia di wilayah Nusa Tenggara dapat dikatakan tertinggal dari wilayah-wilayah lain. Dari total 33 provinsi, peringkat IPM provinsi Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur masing-masing 32 dan 31. Jika di NTB tingkat kesehatan masyarakat yang menjadi permasalahan utama, di NTT tingginya kemiskinan merupakan penghambat utama pembangunan sumber daya manusia.

4. Rendahnya kinerja birokrasi dan tata kelola.

Kinerja aparat birokrasi yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pelayanan publik dirasa semakin penting bagi pengembangan daerah-daerah tertinggal. Tata kelola yang baik akan memastikan alokasi sumber daya secara adil tanpa mengabaikan efektivitas dan efisiensi. Pelayanan publik dan regulasi yang berkualitas juga berpotensi meningkatkan daya tarik daerah bagi berlangsungnya investasi.

5. Potensi konflik antar golongan yang didukung oleh organisasi massa.

Tingginya frekuensi konflik di masyarakat menunjukkan tipisnya modal sosial. Tiadanya rasa saling percaya menjadi penghambat terbentuknya kerjasama produktif yang justru diperlukan bagi suatu komunitas untuk berkembang. Di sisi lain, modal sosial juga berperan dalam mengurangi biaya transaksi ekonomi.

6. Ancaman degradasi lingkungan hidup di darat dan di laut.

Wilayah kepulauan Nusa Tenggara mempunyai potensi flora dan fauna, di darat dan di laut. Namun wilayah kepulauan juga memiliki kerentanan relatif tinggi terhadap perubahan cuaca dan pemanfaatan sumber daya alam secara berlebihan. Untuk itu, pemanfaatan kekayaan alam dan lingkungan secara arif akan sangat strategis dalam memastikan terjaganya daya dukung lingkungan.

6.2 Arah Pengembangan Wilayah

Dengan memperhatikan Rancangan Rencana Tata Ruang Wilayah, pengembangan wilayah Nusa Tenggara diarahkan untuk (1) mengembangkan kota-kota di kawasan pesisir sebagai pusat pelayanan kegiatan industri kemaritiman terpadu sebagai sektor basis yang didukung oleh prasarana dan sarana yang memadai, khususnya transportasi, energi, dan sumber daya air; (2) mengembangkan wilayah darat, laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil sebagai satu kesatuan wilayah Kepulauan Nusa Tenggara melalui kegiatan pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang yang terpadu yang didukung oleh prasarana dan sarana yang memadai; (3) meningkatkan aksesibilitas antar kota-kota pesisir yang menghubungkan poros Banda Aceh–Atambua sehingga membentuk keterkaitan sosial ekonomi yang kuat; (4) meningkatkan

keterkaitan pengembangan antarkawasan (Kawasan Andalan dan Kawasan Andalan Laut) untuk mengoptimalkan potensi wisata budaya dan wisata alam, termasuk wisata bahari, dengan mengembangkan jalur wisata terpadu Bali -Lombok –Komodo–Tana Toraja; (5) menetapkan fokus spesialisasi penanganan komoditas unggulan termasuk pemasarannya, yang berorientasi ekspor, dengan mengutamakan pengelolaan sumberdaya alam terbarukan berdasarkan prinsip kemanfaatan bersama antarwilayah maupun antarkawasan; (6) memanfaatkan keberadaan Forum Kerja sama Daerah dan Forum Kerjasama Ekonomi Internasional baik secara bilateral dengan Australia dan Timor Leste, maupun secara multilateral dalam konteks kerja sama ekonomi sub-regional; (7) meningkatkan perlindungan kawasan konservasi nasional di Kepulauan Nusa Tenggara khususnya konservasi laut agar kelestariannya terpelihara; serta (8) mengelola kawasan perbatasan darat dengan Timor Leste dan Kawasan perbatasan laut dengan Timor Leste dan Australia sebagai 'beranda depan' Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pengembangan sistem pusat permukiman di wilayah Nusa Tenggara ditekankan pada terbentuknya fungsi dan hierarki pusat permukiman sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) yang meliputi Pusat Kegiatan Nasional (PKN) , Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), Pusat Kegiatan Lokal (PKL) dan Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) di kawasan perbatasan negara. Pengembangan Pusat Kegiatan Nasional (PPKN) di wilayah Nusa Tenggara diarahkan untuk mendorong pengembangan kota Mataram dan Kupang sebagai pusat pelayanan primer yang sesuai dengan daya dukung lingkungannya. Pengembangan Pusat Kegiatan Wilayah di wilayah Nusa Tenggara diarahkan untuk (1) mendorong pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi wilayah yang berperan juga sebagai pusat industri pengolahan hasil kelautan dan perikanan, melalui pembangunan prasarana dan sarana pendukung; (2) mendorong pengembangan kota Praya, Raba, Sumbawa Besar, Ende, Kefamenanu, dan Labuhan Bajo sebagai pusat pelayanan sekunder dan pusat pertumbuhan ekonomi wilayah sekaligus sebagai pusat perkembangan industri maritim dan kelautan; dan (3) mengendalikan pengembangan kota Soe, Waingapu, Maumere, dan Ruteng sebagai pusat pelayanan sekunder yang sesuai dengan daya dukung lingkungannya. pengembangan pusat kegiatan strategis nasional di wilayah Nusa Tenggara diarahkan untuk mendorong perkembangan kota Atambua dan Kupang yang terletak di kawasan perbatasan negara.

6.3 Tujuan dan Sasaran Pengembangan Wilayah

Berdasarkan arahan pengembangan wilayah Nusa Tenggara, maka tujuan pembangunan wilayah Nusa Tenggara untuk kurun waktu 2010-2014 adalah untuk:

1. meningkatkan standar hidup masyarakat wilayah Nusa Tenggara.
2. meningkatkan aksesibilitas masyarakat wilayah Nusa Tenggara terhadap pelayanan publik dasar.

3. mewujudkan keseimbangan pembangunan wilayah Nusa Tenggara bagian Barat dan Timur.
4. meningkatkan kontribusi wilayah Nusa Tenggara dalam perdagangan internasional.
5. mengoptimalkan sektor unggulan di wilayah Nusa Tenggara.
6. meningkatkan jaringan transportasi antarwilayah.
7. meningkatkan jumlah, mutu, dan jangkauan sistem jaringan prasarana dasar (jalan, pelabuhan, lapangan udara, telekomunikasi, listrik, dan telepon).

Dengan mengacu pada tujuan dari pengembangan wilayah Nusa Tenggara, sasaran yang dicapai dalam rangka pengembangan wilayah Nusa Tenggara kurun waktu tahun 2010—2014 adalah sebagai berikut:

1. meningkatnya standar hidup masyarakat wilayah Nusa Tenggara, yang ditunjukkan dengan membaiknya berbagai indikator pembangunan yaitu pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, pengangguran, angka kematian bayi, angka harapan hidup, pengangguran serta pendapatan per kapita.
2. meningkatnya standar layanan jasa pendidikan di wilayah Nusa Tenggara.
3. meningkatnya standar layanan jasa kesehatan di wilayah Nusa Tenggara.
4. berkurangnya ketimpangan kontribusi perdagangan internasional antara wilayah Nusa Tenggara bagian barat dengan Nusa Tenggara bagian timur.
5. meningkatnya produksi dan produktivitas perikanan laut dengan terbentuknya industri pengolahan hasil laut di wilayah Nusa Tenggara.

TABEL 6.4
SASARAN PERTUMBUHAN EKONOMI, KEMISKINAN DAN PENGANGGURAN
DI WILAYAH NUSA TENGGARA TAHUN 2010-2014

Provinsi	Pertumbuhan Ekonomi (%) ¹⁾		Kemiskinan (%) ²⁾		Pengangguran (%) ³⁾	
	2010	2014	2010	2014	2010	2014
NTB	3,0 – 3,5	3,6 – 4,0	21,42 – 20,93	15,94 – 14,88	3,6 – 3,9	2,2 – 2,4
NTT	5,4 – 5,9	5,8 – 6,4	22,64 – 22,12	16,95 -16,87	1,7 – 1,9	1,2- 1,4

Sumber : Perhitungan Bappenas;BPS; Susenas;

*Keterangan: ¹⁾ *Pertumbuhan Ekonomi: persentase laju perubahan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).*

²⁾ *Kemiskinan: persentase jumlah penduduk miskin terhadap total jumlah penduduk.*

³⁾ *Pengangguran: persentase jumlah pengangguran terbuka terhadap total angkatan kerja.*

TABEL 6.5
SASARAN ANGKA KEMATIAN BAYI, ANGKA HARAPAN HIDUP,
RATA-RATA LAMA SEKOLAH DAN PENDAPATAN PERKAPITA
DI WILAYAH NUSA TENGGARA TAHUN 2010-2014

Provinsi	Angka Kematian Bayi ¹⁾		Rata-Rata Lama Sekolah ²⁾		Angka Harapan Hidup ³⁾		Pendapatan Perkapita (Rp. Ribu) ⁴⁾	
	2010	2014	2010	2014	2010	2014	2010	2014
NTB	44	37	7,06	7,42	66,18	67,76	4.070.931	5.442.833
NTT	32	27	6,68	6,96	69,25	70,58	3.466.904	4.487.902

Sumber : Perhitungan Bappenas;BPS; Susenas;

*Keterangan: ¹⁾ *Angka Kematian Bayi: jumlah bayi yang meninggal sebelum mencapai usia 1 tahun per 1000 kelahiran hidup.*

²⁾ *Rata-rata Lama Sekolah: rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani.*

³⁾ *Angka Harapan Hidup: perkiraan lama hidup rata-rata penduduk.*

⁴⁾ *Pendapatan per kapita: pendapatan regional dibagi dengan jumlah penduduk pada pertengahan tahun.*

6.4 Arah Kebijakan dan Strategi Pengembangan

Berdasarkan arahan, tujuan, dan sasaran serta dengan mempertimbangkan isu strategis wilayah Nusa Tenggara, arah kebijakan dan strategi wilayah Nusa Tenggara kurun waktu 2010—2014 adalah sebagai berikut:

1. Optimalisasi pengembangan sentra produksi komoditas unggulan, dengan strategi pengembangan sebagai berikut:
 - a. mengembangkan sentra produksi rumput laut.
 - b. mengembangkan sentra produksi jagung.
 - c. mengembangkan sentra produksi kakao.
 - d. mengembangkan sentra produksi peternakan.
 - e. mengembangkan sentra produksi perikanan tangkap.
2. Pengembangan PKN Mataram dan Kupang sebagai pusat industri pengolahan komoditas unggulan dan pariwisata, dengan strategi pengembangan sebagai berikut:
 - a. mengembangkan industri pengolahan rumput laut.
 - b. mengembangkan industri pengolahan jagung.
 - c. mengembangkan industri pengolahan kakao.
 - d. mengembangkan industri pengolahan peternakan.
 - e. mengembangkan industri pengolahan perikanan tangkap.
3. Pengembangan pariwisata bahari dengan strategi pengembangan sebagai berikut:
 - a. meningkatkan aksesibilitas dari sentra-sentra produksi di Bayan, Keruak, Batukliang dan sekitarnya melalui keterpaduan sistem transportasi darat dan laut.
 - b. mengembangkan objek pariwisata.
 - c. meningkatkan kinerja pembangunan kepariwisataan di sekitar Gili Trawangan, Air dan Meno yang memiliki potensi sangat besar melalui pengembangan fasilitas pendukung berstandar internasional.
 - d. mengembangkan kawasan industri pengolahan bahan tambang dan perikanan tangkap yang komplementer dengan keberadaan pelabuhan internasional Teluk Kupang.
 - e. meningkatkan aksesibilitas kota Kupang ke sentra-sentra produksi di sekitarnya.

- f. mengembangkan sentra produksi pertanian tanaman pangan dan hortikultura, tanaman tahunan, hasil hutan, perikanan tangkap, wisata lingkungan, serta wisata bahari.
4. Pemantapan kedaulatan wilayah nasional melalui pendekatan keamanan dan kesejahteraan, dengan strategi pengembangan sebagai berikut:
 - a. meningkatkan stabilitas keamanan kawasan perbatasan.
 - b. mengembangkan kegiatan ekonomi di kawasan perbatasan.
 - c. mengembangkan kawasan perbatasan secara terpadu untuk mendukung fungsi Pusat Kegiatan Strategis Nasional.
 - d. menguatkan peran pemerintah daerah dalam penanganan batas wilayah dan pengembangan kawasan.
 5. Pengembangan infrastruktur yang dapat menghubungkan antarkota, pulau-pulau, wilayah tertinggal dan wilayah terpencil, dengan strategi pengembangan sebagai berikut:
 - a. mengembangkan jaringan jalan lintas Nusa Tenggara.
 - b. meningkatkan aksesibilitas pulau-pulau terpencil dan terdepan/terluar.
 - c. mengembangkan jaringan transportasi penyeberangan antarpulau (pelabuhan).
 - d. mengembangkan jaringan prasarana transportasi penyeberangan (pelabuhan) Lembar dan Sape.
 - e. mengembangkan jaringan prasarana transportasi penyeberangan (pelabuhan) Labuhan Bajo, Waingapu, Sumba, dan Maropko.
 - f. mengembangkan jaringan prasarana pelabuhan laut sebagai Pelabuhan Nasional di Lembar dan Bima.
 - g. meningkatkan sarana transportasi untuk melayani rute daerah tertinggal.
 6. Peningkatan kualitas sumber daya manusia untuk mendukung ketersediaan angkatan kerja berketerampilan dan berpendidikan tinggi, dengan strategi pengembangan sebagai berikut:
 - a. meningkatkan akses pelayanan pendidikan dan keterampilan kerja.
 - b. meningkatkan produktivitas angkatan kerja dan mengembangkan ekonomi lokal.
 - c. menyebarkan pembangunan fasilitas pendidikan ke wilayah Nusa Tenggara.
 - d. meningkatkan fasilitas pendidikan non formal.

7. Peningkatan akses fasilitas kesehatan, dengan strategi pengembangan sebagai berikut:
 - a. menyebarkan pembangunan fasilitas kesehatan.
8. Peningkatan reformasi birokrasi dan tata kelola, dengan strategi pengembangan sebagai berikut:
 - a. meningkatkan kualitas regulasi dan peraturan daerah.
 - b. meningkatkan penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) termasuk penanganan kasus korupsi.
 - c. meningkatkan kualitas pelayanan publik.
9. Penanggulangan konflik sosial secara partisipatif, dengan strategi pengembangan sebagai berikut:
 - a. menguatkan kelembagaan kerjasama antara aparat kepolisian, tokoh agama dan adat dalam penyelesaian konflik antar golongan.
 - b. mengembangkan simpul kerja sama antara kelompok masyarakat, lembaga pemerintah, dan swasta.
 - c. menegakkan hukum yang adil, tidak diskriminatif terhadap pelaku kejahatan.
10. Peningkatan daya dukung dan keberlanjutan lingkungan, dengan strategi pengembangan sebagai berikut:
 - a. meningkatkan kualitas rencana tata ruang wilayah.
 - b. meningkatkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

MATRIK BUKU III RPJMN 2010-2014 WILAYAH NUSA TENGGARA
ISU STRATEGIS, ARAH KEBIJAKAN, WILAYAH, STRATEGI PEMBANGUNAN, DAN FOKUS PRIORITAS

ISU STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN	WILAYAH	STRATEGI PENGEMBANGAN	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS
<p>Optimalisasi pengembangan sektor dan komoditas unggulan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Belum optimalnya peran industri unggulan rumput laut, peternakan, perikanan dan pariwisata sebagai penggerak perekonomian Provinsi Nusa Tenggara Barat • Belum optimalnya industri unggulan jagung, kakao, peternakan, perikanan, dan pariwisata sebagai motor penggerak perekonomian Provinsi Nusa Tenggara Timur 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan sentra produksi komoditas unggulan 	<ul style="list-style-type: none"> • Nusa Tenggara Barat 	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan produktivitas budidaya rumput laut, peternakan, dan usaha perikanan tangkap 	<p>Prioritas Nasional</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penataan regulasi untuk menjamin kepastian hukum atas lahan pertanian • Pengembangan areal pertanian baru. • Penertiban, serta optimalisasi penggunaan lahan terlantar • Pembangunan dan pemeliharaan sarana transportasi dan angkutan yang melayani daerah-daerah sentra produksi pertanian demi peningkatan kuantitas dan kualitas produksi serta kemampuan pemasarannya • Pembangunan dan pemeliharaan pengairan yang melayani daerah-daerah sentra produksi pertanian demi peningkatan kuantitas dan kualitas produksi • Pembangunan dan pemeliharaan jaringan listrik yang melayani daerah-daerah sentra produksi pertanian demi peningkatan kuantitas dan kualitas produksi • Pembangunan dan pemeliharaan teknologi komunikasi dan sistem informasi nasional yang melayani daerah-daerah sentra produksi pertanian demi peningkatan kuantitas dan kualitas produksi serta kemampuan pemasarannya • Peningkatan upaya penelitian dan pengembangan bidang pertanian yang mampu menciptakan benih unggul dan hasil penelitian lainnya menuju kualitas dan produktivitas hasil pertanian nasional yang tinggi • Dorongan untuk investasi pangan, pertanian, dan industri perdesaan berbasis produk lokal oleh pelaku usaha dan pemerintah

ISU STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN	WILAYAH	STRATEGI PENGEMBANGAN	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS
				<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya • Pengelolaan Pertanahan Provinsi • Revitalisasi Pasar Tradisional • Pengembangan dan penetapan sistem logistik nasional yang menjamin kelancaran arus barang dan mengurangi biaya transaksi/ekonomi biaya tinggi <p>Prioritas Pulau</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan penguasaan teknologi budidaya rumput laut dan peternakan • Pengembangan insentif bagi konsolidasi usaha perikanan dan peternakan skala mikro dan kecil • Peningkatan dukungan sarana dan prasarana perikanan • Peningkatan akses permodalan khususnya bagi nelayan skala mikro dan kecil
		<ul style="list-style-type: none"> • Nusa Tenggara Timur 	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan produktivitas budidaya jagung, kakao, peternakan, dan usaha perikanan tangkap 	<p>Prioritas Nasional</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penataan regulasi untuk menjamin kepastian hukum atas lahan pertanian • Pengembangan areal pertanian baru • Penertiban, serta optimalisasi penggunaan lahan terlantar • Pembangunan dan pemeliharaan sarana transportasi dan angkutan yang melayani daerah-daerah sentra produksi pertanian demi peningkatan kuantitas dan kualitas produksi serta kemampuan pemasarannya • Pembangunan dan pemeliharaan pengairan yang melayani daerah-daerah sentra produksi pertanian demi peningkatan kuantitas dan kualitas produksi • Pembangunan dan pemeliharaan jaringan listrik yang melayani daerah-daerah sentra produksi pertanian demi peningkatan kuantitas dan kualitas produksi

ISU STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN	WILAYAH	STRATEGI PENGEMBANGAN	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS
				<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan dan pemeliharaan teknologi komunikasi dan sistem informasi nasional yang melayani daerah-daerah sentra produksi pertanian demi peningkatan kuantitas dan kualitas produksi serta kemampuan pemasarannya • Peningkatan upaya penelitian dan pengembangan bidang pertanian yang mampu menciptakan benih unggul dan hasil penelitian lainnya menuju kualitas dan produktivitas hasil pertanian nasional yang tinggi • Dorongan untuk investasi pangan, pertanian, dan industri perdesaan berbasis produk lokal oleh pelaku usaha dan pemerintah • Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya • Pengelolaan Pertanahan Provinsi • Revitalisasi Pasar Tradisional • Pengembangan dan penetapan sistem logistik nasional yang menjamin kelancaran arus barang dan mengurangi biaya transaksi/ekonomi biaya tinggi <p>Prioritas Pulau</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan penguasaan teknologi budidaya rumput laut dan peternakan • Pengembangan insentif bagi konsolidasi usaha perikanan dan peternakan skala mikro dan kecil • Peningkatan dukungan sarana dan prasarana perikanan • Peningkatan akses permodalan khususnya bagi nelayan skala mikro dan kecil
	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan klaster industri berbasis 	<ul style="list-style-type: none"> • NTT 	<ul style="list-style-type: none"> • Mengembangkan PKN Mataram dan Kupang 	<p>Prioritas Nasional</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penyelesaian pembangunan Lintas Nusa Tenggara

ISU STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN	WILAYAH	STRATEGI PENGEMBANGAN	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS
	komoditas unggulan	<ul style="list-style-type: none"> • NTB 	sebagai pusat pengembangan industri pengolahan komoditas unggulan	<ul style="list-style-type: none"> • Penuntasan pembangunan jaringan serat optik di Indonesia Bagian Timur sebelum 2013 • Penyediaan Jasa Telekomunikasi • Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan • Penataan Produk Hukum dan Pelayanan Bantuan Hukum Departemen • Peningkatan Deregulasi Kebijakan • Pengelolaan Pertanahan Provinsi • Pengembangan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) • Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Penanaman Modal • Administrasi Badan Hukum • Koordinasi Penataan dan Pengembangan Sistem Logistik Nasional • Perumusan Kebijakan dan Bimbingan Teknis Fasilitas Bidang Kepabeanaan • Pengembangan dan penetapan sistem logistik nasional yang menjamin kelancaran arus barang dan mengurangi biaya transaksi/ekonomi biaya tinggi • Pengelolaan Fasilitas Ekspor dan Impor • Perumusan Kebijakan dan Pengembangan Teknologi Informasi Kepabeanaan dan Cukai • Pengembangan sertifikasi sistem elektronik jasa aplikasi dan konten untuk mendukung transaksi elektronik • Koordinasi pengembangan dan penerapan sistem National Single Window/NSW dan ASEAN Single Window/ASW • Penguatan lembaga hubungan industrial: (a) mendorong pembentukan lembaga

ISU STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN	WILAYAH	STRATEGI PENGEMBANGAN	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS
			<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan keterkaitan antara 	<p>bipartite; (b) Penguatan perundingan antara perwakilan pekerja dan pengusaha dengan meningkatkan teknik-teknik bernegosiasi; (c) Peningkatan kualitas penyelesaian perselisihan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penetapan kebijakan energi yang memastikan penanganan energi nasional yang terintegrasi sesuai dengan Rencana Induk Energi Nasional • Peningkatan kapasitas pembangkit listrik melalui Pembangkit PLTD (Unit/kW) • Peningkatan kapasitas pembangkit listrik melalui Jaringan Transmisi Tenaga Listrik (kms) • Peningkatan kapasitas pembangkit listrik melalui Gardu Induk Transmisi Tenaga Listrik (kms) • Peningkatan kapasitas pembangkit listrik melalui Gardu Distribusi kVA • Peningkatan kapasitas pembangkit listrik melalui JTM • Peningkatan kapasitas pembangkit listrik melalui JTR • Peningkatan kapasitas PLTP terpasang <p>Prioritas Pulau</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan akses permodalan • Peningkatan penguasaan teknologi pengolahan • Pengembangan kerjasama antara dunia usaha dan perguruan tinggi/lembaga penelitian dalam penelitian teknologi tepat guna • Peningkatan promosi produk unggulan dan akses pemasaran <p>Prioritas Nasional</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan dan pemeliharaan sarana transportasi dan angkutan yang melayani

III.M.6-5

ISU STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN	WILAYAH	STRATEGI PENGEMBANGAN	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS
			sentra-sentra produksi dan pusat-pusat pengembangan industri (PKN)	daerah-daerah sentra produksi pertanian demi peningkatan kuantitas dan kualitas produksi serta kemampuan pemasarannya <ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan Jasa Telekomunikasi • Peningkatan Kelancaran Distribusi Bahan Pokok • Pengembangan dan penetapan sistem logistik nasional yang menjamin kelancaran arus barang dan mengurangi biaya transaksi/ekonomi biaya tinggi Prioritas Pulau <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan sarana dan prasarana transportasi penghubung PKN dan sentra-sentra produksi • Peningkatan prasarana telekomunikasi • Pengembangan pasar lokal dan regional • Pengembangan kerjasama antardaerah
	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan industri pariwisata alam dan budaya 	<ul style="list-style-type: none"> • NTB 	<ul style="list-style-type: none"> • Mengembangkan pariwisata alam bahari dan budaya 	Prioritas Nasional <ul style="list-style-type: none"> • Penyelesaian pembangunan Lintas Nusa Tenggara • Penyediaan Jasa Telekomunikasi • Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan • Peningkatan Deregulasi Kebijakan • Pengembangan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) • Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Penanaman Modal

ISU STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN	WILAYAH	STRATEGI PENGEMBANGAN	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS
				<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan Pengelolaan Peninggalan Kepurbakalaan • Pengembangan Pengelolaan Permuseuman • Penelitian dan Pengembangan Bidang Arkeologi (Bd) • Penelitian dan Pengembangan Bidang Kebudayaan • Pelestarian dan Pengembangan Kesenian <p>Prioritas Pulau</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan interkoneksi Mataram dan kota-kota besar nasional lainnya • Peningkatan promosi pariwisata • Peningkatan kerjasama antar daerah dalam pengembangan interkoneksi obyek-obyek wisata lokal NTB dan memperkuat keterkaitan poros Mataram-Denpasar
		<ul style="list-style-type: none"> • NTT 	<ul style="list-style-type: none"> • Mengembangkan pariwisata alam komodo di Pulau Komodo dan Rinca 	<p>Prioritas Nasional</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penyelesaian pembangunan Lintas Nusa Tenggara • Penyediaan Jasa Telekomunikasi • Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan • Peningkatan Deregulasi Kebijakan • Pengembangan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) • Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Penanaman Modal • Pengembangan Pengelolaan Peninggalan Kepurbakalaan • Pengembangan Pengelolaan Permuseuman • Penelitian dan Pengembangan Bidang Arkeologi (Bd) • Penelitian dan Pengembangan Bidang Kebudayaan

ISU STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN	WILAYAH	STRATEGI PENGEMBANGAN	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS
				<ul style="list-style-type: none"> • Pelestarian dan Pengembangan Kesenian Prioritas Pulau <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan interkoneksi Kupang dan kota-kota besar nasional lainnya • Peningkatan kerjasama antar daerah dalam pengembangan interkoneksi obyek-obyek wisata lokal NTT dan memperkuat keterkaitan poros wisata Kupang-Mataram-Denpasar • Peningkatan promosi pariwisata • Pengembangan jaringan transportasi darat dan laut untuk mendukung interkoneksi domestik antar obyek wisata
Pembangunan wilayah perbatasan dan kerjasama dengan negara-negara yang berbatasan dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia: <ul style="list-style-type: none"> • Belum disepakatinya beberapa segmen batas darat antara RI-Timor Leste • Belum disepakatinya batas maritim RI-Timor Leste karena menunggu penyelesaian batas darat • Rendahnya kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemantapan kedaulatan wilayah nasional melalui pendekatan keamanan dan kesejahteraan 	<ul style="list-style-type: none"> • NTT 	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan stabilitas keamanan kawasan perbatasan 	Prioritas Nasional <ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan kebijakan khusus dalam bidang infrastruktur dan pendukung kesejahteraan lainnya yang dapat mendorong pertumbuhan di daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan pasca-konflik • Pembentukan kerjasama dengan negara-negara tetangga dalam rangka pengamanan wilayah dan sumber daya kelautan • Penyelesaian pemetaan wilayah perbatasan RI dengan Malaysia, Papua Nugini, Timor Leste, dan Filipina pada 2010 Prioritas Pulau <ul style="list-style-type: none"> • Penetapan dan penegasan batas negara • Penyediaan sarana dan prasarana lintas batas, pertahanan, dan keamanan
			<ul style="list-style-type: none"> • Mengembangkan kegiatan ekonomi di kawasan perbatasan 	Prioritas Nasional <ul style="list-style-type: none"> • Integrasi Program Perlindungan Sosial berbasis keluarga (PKH, bantuan pangan, jamkesmas, beasiswa anak keluarga berpendapatan rendah, PAUD)

ISU STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN	WILAYAH	STRATEGI PENGEMBANGAN	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS
				<ul style="list-style-type: none"> • Penambahan anggaran PNPM Mandiri dari Rp. 10,3 T pada tahun 2009 menjadi Rp. 12,1 T pada tahun 2010*) • Penataan regulasi untuk menjamin kepastian hukum atas lahan pertanian • Penyediaan Jasa Telekomunikasi • Pengembangan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) • Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Penanaman Modal • Administrasi Badan Hukum • Revitalisasi Pasar Tradisional • Pengembangan dan penetapan sistem logistik nasional yang menjamin kelancaran arus barang dan mengurangi biaya transaksi/ekonomi biaya tinggi • Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Jalan Nasional • Penetapan kebijakan energi yang memastikan penanganan energi nasional yang terintegrasi sesuai dengan Rencana Induk Energi Nasional • Peningkatan kapasitas pembangkit listrik melalui Pembangkit PLTD (Unit/kW) • Listrik Desa (EBT) • PLTS Tersebar • PLTS Terpusat • PLTMH (kW) • PLT Angin (kW) • Pelaksanaan kebijakan khusus dalam bidang infrastruktur dan pendukung kesejahteraan lainnya yang dapat mendorong pertumbuhan di daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan

ISU STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN	WILAYAH	STRATEGI PENGEMBANGAN	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS
				pasca-konflik • Pengentasan daerah tertinggal Prioritas Pulau • Pemberdayaan masyarakat dan introduksi teknologi tepat guna • Peningkatan akses permodalan • Penguatan kerjasama antardaerah dalam pengembangan ekonomi lokal
Rendahnya interkonektivitas domestik pulau-pulau di Wilayah Nusa Tenggara: • Minimnya akses infrastruktur perhubungan di Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur, khususnya yang melayani daerah tertinggal, terpencil dan pulau-pulau kecil	• Penguatan interkonektivitas domestik kota-kota, pulau-pulau, wilayah tertinggal dan wilayah terpencil	• NTB • NTT	• Mengembangkan jaringan jalan lintas Nusa Tenggara • Mengembangkan jaringan transportasi penyeberangan antar pulau (pelabuhan)	Prioritas Nasional • Konsolidasi kebijakan penanganan dan pemanfaatan tanah untuk kepentingan umum secara menyeluruh dibawah satu atap dan pengelolaan tata ruang secara terpadu • Penyelesaian pembangunan Lintas Nusa Tenggara • Penurunan tingkat kecelakaan transportasi • Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Jalan Nasional • Pelaksanaan kebijakan khusus dalam bidang infrastruktur dan pendukung kesejahteraan lainnya yang dapat mendorong pertumbuhan di daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan pasca-konflik Prioritas Nasional • Pembangunan jaringan prasarana dan penyediaan sarana transportasi antar moda dan antar pulau yang terintegrasi sesuai dengan sistem transportasi nasional dan cetak biru transportasi multimoda • Penurunan tingkat kecelakaan transportasi • Pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan di bidang lalu lintas dan angkutan laut

ISU STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN	WILAYAH	STRATEGI PENGEMBANGAN	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS
				<p>(Pembangunan kapal perintis dan subsidi operasi perintis)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengelolaan dan pembangunan kegiatan di bidang pelabuhan dan pengerukan • Pelaksanaan kebijakan khusus dalam bidang infrastruktur dan pendukung kesejahteraan lainnya yang dapat mendorong pertumbuhan di daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan pasca-konflik <p>Prioritas Pulau</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan pelabuhan Lembar, Sape, Labuhan Bajo, Waingapu, Sumba, Maropko, Bima <p>Prioritas Nasional</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan jaringan prasarana dan penyediaan sarana transportasi antar moda dan antar pulau yang terintegrasi sesuai dengan sistem transportasi nasional dan cetak biru transportasi multimoda • Penurunan tingkat kecelakaan transportasi • Pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan di bidang lalu lintas dan angkutan laut (Pembangunan kapal perintis dan subsidi operasi perintis) • Pengelolaan dan pembangunan kegiatan di bidang pelabuhan dan pengerukan • Pelaksanaan kebijakan khusus dalam bidang infrastruktur dan pendukung kesejahteraan lainnya yang dapat mendorong pertumbuhan di daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan pasca-konflik • Pengentasan daerah tertinggal
<p>Kualitas sumberdaya manusia</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rendahnya IPM dibanding rata-rata nasional 	<p>Peningkatan kualitas sumber daya manusia untuk mendukung ketersediaan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • NTB • NTT 	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan akses pelayanan pendidikan dan ketrampilan kerja 	<p>Prioritas Nasional</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan APM Pendidikan Dasar, Mengengah dan SMA • Pemantapan/ rasionalisasi implementasi BOS

ISU STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN	WILAYAH	STRATEGI PENGEMBANGAN	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS
<ul style="list-style-type: none"> • Rendahnya akses terhadap pendidikan dasar dan menengah di Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur • Rendahnya status kesehatan dan gizi masyarakat di Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur 	<p>angkatan kerja berkecakupan dan berpendidikan tinggi</p>			<ul style="list-style-type: none"> • Penurunan harga buku standar di tingkat sekolah dasar dan menengah • Penyediaan sambungan internet ber-content pendidikan ke sekolah tingkat menengah selambat-lambatnya 2012 dan terus diperluas ke tingkat sekolah dasar • Peningkatan APK Pendidikan Tinggi • Penyesuaian sistem Ujian Akhir Nasional pada 2011 • Penyempurnaan kurikulum sekolah dasar-menengah sebelum tahun 2011 yang diterapkan di 25% sekolah pada 2012 dan 100% pada 2014 • Pemberdayaan peran Kepala Sekolah sebagai manager sistem pendidikan yang unggul • Revitalisasi peran Pengawas Sekolah sebagai entitas <i>quality assurance</i> • Mendorong aktivasi peran Komite Sekolah untuk menjamin keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses pembelajaran • Mendorong aktivasi peran Dewan Pendidikan di tingkat kabupaten • Penataan ulang kurikulum sekolah yang dibagi menjadi kurikulum tingkat nasional, daerah, dan sekolah dengan memasukkan pendidikan kewirausahaan • Program remediasi kemampuan mengajar guru • Penerapan sistem evaluasi kinerja profesional tenaga pengajar • Sertifikasi ISO 9001:2008 • Peningkatan kerjasama PTN dengan lembaga pendidikan internasional • Mendorong 11 PT masuk Top 500 THES pada 2014 • Peningkatan perbandingan guru:murid • Memastikan tercapainya Standar Nasional Pendidikan (SNP) bagi Pendidikan Agama dan Keagamaan paling lambat tahun 2013

ISU STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN	WILAYAH	STRATEGI PENGEMBANGAN	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS
				<ul style="list-style-type: none"> • Layanan Jasa Perpustakaan dan Informasi • Pengembangan Perpustakaan dan Pengkajian Minat Baca <p>Prioritas Pulau</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan pendidikan vokasional • Penyelenggaraan Pendidikan Keaksaraan Fungsional
			<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan akses pelayanan kesehatan 	<p>Prioritas Nasional</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak • Pemberian imunisasi dasar kepada balita • Penyediaan akses sumber air bersih • Peningkatan akses sanitasi dasar berkualitas • Pemberlakuan Daftar Obat Esensial Nasional (DOEN) sebagai dasar pengadaan obat di seluruh Indonesia dan pembatasan harga obat generik bermerek pada tahun 2010 • Perluasan Asuransi Kesehatan Nasional melalui : i) Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin di Puskesmas; ii) Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin di Rumah Sakit; iii) Dukungan Manajemen Pengelolaan, Pembinaan, dan Pengembangan Jaminan Kesehatan • Peningkatan kualitas dan jangkauan layanan KB melalui klinik pemerintah dan swasta melalui: i) Pembinaan kesertaan ber KB; ii) Penguatan Sumberdaya Penyelenggara program KB; iii) Peningkatan advokasi pada stakeholder; iv) Peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi pengendalian penduduk dan KB; v) Pengembangan Media Komunikasi; vi) Peningkatan kemitraan dengan lintas sektor dan pemda; viii) Peningkatan kemitraan dengan sektor swasta, LSM, dan masyarakat; viii) Penyediaan data dan informasi program kependudukan dan KB

ISU STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN	WILAYAH	STRATEGI PENGEMBANGAN	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS
			<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan produktivitas angkatan kerja dan mengembangkan ekonomi lokal 	<ul style="list-style-type: none"> • Penurunan prevalensi Tuberculosis • Penurunan kasus malaria (Annual Parasite Index-API) • Pengendalian prevalensi HIV pada populasi dewasa • Penurunan prevalensi kekurangan gizi (terdiri dari gizi-kurang dan gizi-buruk) pada anak balita <p>Prioritas Pulau</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pemberian insentif bagi tenaga medis yang ditempatkan di daerah-daerah tertinggal, terpencil, dan pulau-pulau terdepan • Peningkatan edukasi masyarakat tentang pola hidup sehat • Peningkatan kualitas lingkungan permukiman <p>Prioritas Nasional</p> <ul style="list-style-type: none"> • Integrasi Program Perlindungan Sosial berbasis keluarga (PKH, bantuan pangan, jamkesmas, beasiswa anak keluarga berpendapatan rendah, PAUD) • Penambahan anggaran PNPM Mandiri dari Rp. 10,3 T pada tahun 2009 menjadi Rp. 12,1 T pada tahun 2010*) • Penataan regulasi untuk menjamin kepastian hukum atas lahan pertanian • Pengembangan areal pertanian baru. • Penertiban, serta optimalisasi penggunaan lahan terlantar • Pembangunan dan pemeliharaan sarana transportasi dan angkutan yang melayani daerah-daerah sentra produksi pertanian demi peningkatan kuantitas dan kualitas produksi serta kemampuan pemasarannya • Pembangunan dan pemeliharaan pengairan yang melayani daerah-daerah sentra produksi pertanian demi peningkatan kuantitas dan kualitas produksi

ISU STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN	WILAYAH	STRATEGI PENGEMBANGAN	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS
				<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan dan pemeliharaan jaringan listrik yang melayani daerah-daerah sentra produksi pertanian demi peningkatan kuantitas dan kualitas produksi • Pembangunan dan pemeliharaan teknologi komunikasi dan sistem informasi nasional yang melayani daerah-daerah sentra produksi pertanian demi peningkatan kuantitas dan kualitas produksi serta kemampuan pemasarannya • Dorongan untuk investasi pangan, pertanian, dan industri perdesaan berbasis produk lokal oleh pelaku usaha dan pemerintah • Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya • Penyediaan Jasa Telekomunikasi • Peningkatan Deregulasi Kebijakan • Pengelolaan Pertanahan Provinsi • Pengembangan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) • Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Penanaman Modal • Administrasi Badan Hukum • Peningkatan Kelancaran Distribusi Bahan Pokok • Revitalisasi Pasar Tradisional • Pengembangan dan penetapan sistem logistik nasional yang menjamin kelancaran arus barang dan mengurangi biaya transaksi/ekonomi biaya tinggi • Menyempurnaan peraturan ketenagakerjaan dan sinkronisasi kebijakan ketenagakerjaan (pusat) dengan kebijakan/ peraturan daerah • Penguatan lembaga hubungan industrial: (a) mendorong pembentukan lembaga

ISU STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN	WILAYAH	STRATEGI PENGEMBANGAN	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS
				<p>bipartite; (b) Penguatan perundingan antara perwakilan pekerja dan pengusaha dengan meningkatkan teknik-teknik bernegosiasi; (c) Peningkatan kualitas penyelesaian perselisihan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penerapan Keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di perusahaan sesuai standard an manajemen K3 • Penetapan kebijakan energi yang memastikan penanganan energi nasional yang terintegrasi sesuai dengan Rencana Induk Energi Nasional • Peningkatan kapasitas pembangkit listrik melalui Pembangkit PLTD (Unit/kW) • Peningkatan kapasitas pembangkit listrik melalui Jaringan Transmisi Tenaga Listrik (kms) • Peningkatan kapasitas pembangkit listrik melalui Gardu Induk Transmisi Tenaga Listrik (kms) • Peningkatan kapasitas pembangkit listrik melalui Gardu Distribusi kVA • Peningkatan kapasitas pembangkit listrik melalui JTM • Peningkatan kapasitas pembangkit listrik melalui JTR • Peningkatan kapasitas PLTP terpasang • Listrik Desa (EBT) • PLTS Tersebar • PLTS Terpusat • PLTMH (kW) • PLT Angin (kW) • Pembangunan unit pengolahan Biofuel

ISU STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN	WILAYAH	STRATEGI PENGEMBANGAN	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS
				<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman tahunan (Penyediaan Bahan bakar Bio Energi) • Pengentasan daerah tertinggal <p>Prioritas Pulau</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan akses permodalan • Introduksi teknologi tepat guna • Pengembangan balai latihan kerja • Peningkatan kompetensi pekerja migran (TKI) dan penguatan kelembagaan perlindungan TKI • Peningkatan efektivitas pelaksanaan dan koordinasi penanggulangan kemiskinan • Peningkatan pendampingan dan fasilitasi dalam pengembangan ekonomi lokal • Peningkatan peran para pemangku kepentingan dalam pengembangan ekonomi lokal
<p>Rendahnya kinerja birokrasi dan tata kelola</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rendahnya kapasitas aparat pemerintah daerah dalam tata pemerintahan yang baik 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan reformasi birokrasi dan tata kelola 	<ul style="list-style-type: none"> • NTB • NTT 	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan kualitas regulasi dan peraturan daerah 	<p>Prioritas Nasional</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembinaan administrasi pejabat negara di daerah dan DPRD • Pendidikan dan pelatihan Bidang Pemerintahan dan Politik • Penataan Urusan Pemerintahan Daerah dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah • Penataan Produk Hukum dan Pelayanan Bantuan Hukum Departemen • Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerjasama Daerah • Penataan Produk Hukum dan Pelayanan Bantuan Hukum Departemen <p>Prioritas Pulau</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik

ISU STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN	WILAYAH	STRATEGI PENGEMBANGAN	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS
			<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan penegakan hukum dan HAM termasuk penanganan kasus korupsi 	<p>Prioritas Nasional</p> <ul style="list-style-type: none"> Pembinaan Administrasi Anggaran Daerah Pembinaan dan Fasilitasi Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah Peningkatan integrasi dan integritas penerapan dan penegakan hukum oleh seluruh lembaga dan aparat hukum <p>Prioritas Pulau</p> <ul style="list-style-type: none"> Peningkatan transparansi dan akuntabilitas lembaga pemerintah
			<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan kualitas pelayanan publik 	<p>Prioritas Nasional</p> <ul style="list-style-type: none"> Penataan Daerah Otonom dan Otonomi Khusus Pembinaan dan Fasilitasi Dana Perimbangan Pembinaan Administrasi Anggaran Daerah Pembinaan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Pendidikan dan pelatihan Bidang Pemerintahan dan Politik Pengembangan Kapasitas dan Evaluasi Kinerja Daerah Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerjasama Daerah Penetapan dan penerapan sistem indikator kinerja utama pelayanan publik yang selaras antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah Pengelolaan Informasi Manajemen Kependudukan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Penanaman Modal <p>Prioritas Pulau</p> <ul style="list-style-type: none"> Pengembangan standar pelayanan minimum

ISU STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN	WILAYAH	STRATEGI PENGEMBANGAN	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS
Potensi konflik antar golongan yang didukung oleh organisasi massa <ul style="list-style-type: none"> Tingginya peluang konflik antar golongan dan suku bangsa 	<ul style="list-style-type: none"> Penanggulangan konflik sosial secara partisipatif 	<ul style="list-style-type: none"> NTB NTT 	<ul style="list-style-type: none"> Memperkuat kelembagaan kerjasama antara aparat kepolisian, tokoh agama dan adat dalam penyelesaian konflik antar golongan 	Prioritas Nasional <ul style="list-style-type: none"> Pelaksanaan kebijakan khusus dalam bidang infrastruktur dan pendukung kesejahteraan lainnya yang dapat mendorong pertumbuhan di daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan pasca-konflik Prioritas Pulau <ul style="list-style-type: none"> Pengembangan budaya harmonis Pencegahan kejahatan dan tindak pelanggaran hukum Pengembangan dan peningkatan jaringan komunikasi intelijen Pemberdayaan masyarakat dalam <i>community policing</i> Penghormatan hukum dan nilai adat Penguatan kerjasama pemerintah dan lembaga-lembaga adat dan informal
			<ul style="list-style-type: none"> Penegakan hukum yang adil dan tidak diskriminatif 	Prioritas Pulau <ul style="list-style-type: none"> Peningkatan transparansi dan akuntabilitas lembaga-lembaga penegak hukum Peningkatan kapasitas aparat penegak hukum Penyelenggaraan Pemantauan Pelaksanaan, Perlindungan, Pemajuan dan Penegakan HAM Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara
Ancaman degradasi lingkungan hidup di darat dan di laut <ul style="list-style-type: none"> Tingginya perambahan hutan dan gangguan lingkungan 	Peningkatan daya dukung dan keberlanjutan lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> NTB NTT 	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan kualitas rencana tata ruang wilayah 	Prioritas Nasional <ul style="list-style-type: none"> Penataan regulasi untuk menjamin kepastian hukum atas lahan pertanian Konsolidasi kebijakan penanganan dan pemanfaatan tanah untuk kepentingan umum secara menyeluruh dibawah satu atap dan pengelolaan tata ruang secara terpadu Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan

ISU STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN	WILAYAH	STRATEGI PENGEMBANGAN	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS
				<ul style="list-style-type: none"> • Pengelolaan Pertanahan Provinsi <p>Prioritas Pulau</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kapasitas aparat pemerintah daerah dalam perencanaan tata ruang wilayah • Integrasi penataan ruang darat dan laut • Peningkatan koordinasi lintas sektor dalam penataan ruang (pertanian, kehutanan, infrastruktur, pertanahan, perikanan dan kelautan) • Penjaringan aspirasi dan penguatan partisipasi publik dalam perencanaan tata ruang wilayah • Peningkatan kerjasama antara pemerintah daerah dan perguruan tinggi/lembaga penelitian
			<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan 	<p>Prioritas Nasional</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penertiban, serta optimalisasi penggunaan lahan terlantar • Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku • Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Air Lainnya • Penurunan beban pencemaran lingkungan melalui pengawasan ketaatan pengendalian pencemaran air limbah dan emisi • Penjaminan berjalannya fungsi Sistem Peringatan Dini Tsunami (TEWS), mulai 2010 dan seterusnya • Penjaminan berjalannya fungsi Sistem Peringatan Dini Cuaca (MEWS) mulai 2010 dan seterusnya • Penjaminan berjalannya fungsi Sistem Peringatan Dini Iklim (CEWS) pada 2013

ISU STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN	WILAYAH	STRATEGI PENGEMBANGAN	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS
				<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah dan masyarakat dalam usaha pengurangan risiko, mitigasi dan penanganan bencana dan bahaya kebakaran hutan • Penyiapan peralatan dan logistik di kawasan rawan bencana <p>Prioritas Pulau</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pemanfaatan teknologi ramah lingkungan • Penerapan analisis dampak lingkungan dalam kegiatan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup • Konservasi keanekaragaman hayati • Penegakan hukum dalam pengendalian pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup • Pelibatan dan peningkatan kapasitas masyarakat sekitar dan lembaga adat dalam mengelola dan menjaga lingkungan • Peningkatan jumlah polisi hutan dan polisi air di kawasan konservasi • Perencanaan, Pembangunan dan Kelembagaan Hutan Rakyat



BAB VII

PENGEMBANGAN WILAYAH MALUKU TAHUN 2010—2014

7.1 Kondisi Wilayah Maluku Saat Ini

7.1.1 Capaian Pembangunan Wilayah

Dalam kurun waktu 2004—2008 perekonomian wilayah Maluku mengalami pertumbuhan yang tidak terlalu tinggi. Pertumbuhan ekonomi Provinsi Maluku dalam periode 2004—2008 mencapai 4,96 persen dan Provinsi Maluku Utara mencapai 5,46 persen. Gambaran mengenai pertumbuhan ekonomi wilayah Maluku dapat dilihat pada Tabel 7.1 sebagai berikut.

TABEL 7.1
PERTUMBUHAN EKONOMI WILAYAH MALUKU TAHUN 2004 - 2008
ATAS DASAR HARGA KONSTAN TAHUN 2000 (DALAM PERSEN)

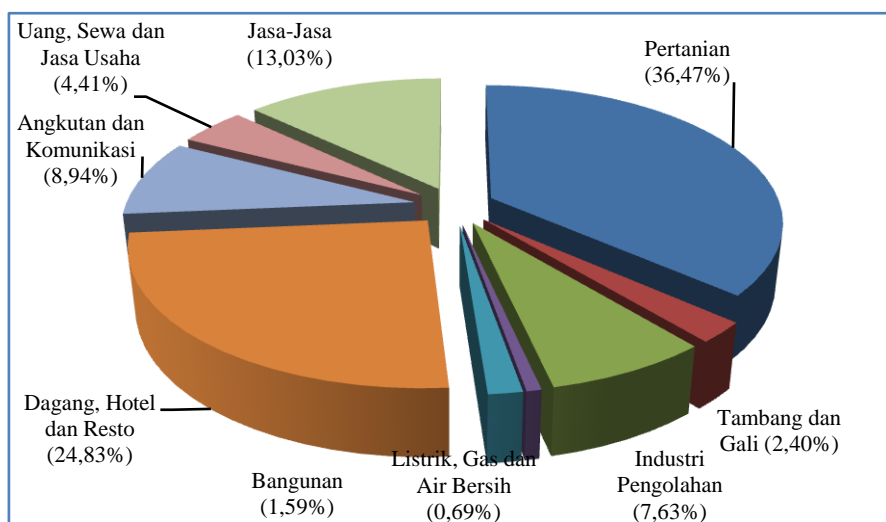
Tahun	Maluku	Maluku Utara
2004	4,4	4,7
2005	5,1	5,1
2006	5,5	5,5
2007	5,6	6,0
2008	4,2	6,0

Sumber : Badan Pusat Statistik

Dari sumbangan sektor ekonomi di wilayah Maluku pada triwulan 1 tahun 2008 (**Gambar 7.1**), peringkat tiga penyumbang terbesar adalah pertanian, perdagangan, hotel, restoran serta jasa-jasa. Sumbangan sektor-sektor tersebut terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) lebih dari 50 persen. Wilayah Maluku memiliki sektor perekonomian berbasis kekayaan sumber daya alam perkebunan, perikanan yang kemudian mendorong berkembangnya berbagai sektor lainnya. Sementara itu, sektor dengan kontribusi terendah adalah sektor listrik, gas, air bersih, dan bangunan. Masih belum tercukupinya sarana dan prasarana dalam menunjang kegiatan ekonomi seperti transportasi serta sarana dan prasarana industri menjadi kendala dalam mengoptimalkan sektor-sektor unggulan di wilayah Maluku.

Wilayah Maluku memiliki potensi pengembangan yang sangat besar berbasis sumber daya alam terutama perikanan dan wisata bahari. Potensi sumber daya perikanan laut sangat besar, tetapi belum dikelola secara optimal. Potensi sumber daya lahan, hutan dan perkebunan juga cukup besar sehingga masih ada peluang pengelolaan sumber daya tersebut untuk pengembangan ekonomi wilayah. Pemanfaatan dan pengelolaan berbagai sumber daya tetap harus mempertimbangkan keterpaduan dan keseimbangan dalam penataan ruang wilayah untuk mencegah eksploitasi yang berlebihan, dan mendorong penyebaran dampak perekonomian ke seluruh wilayah.

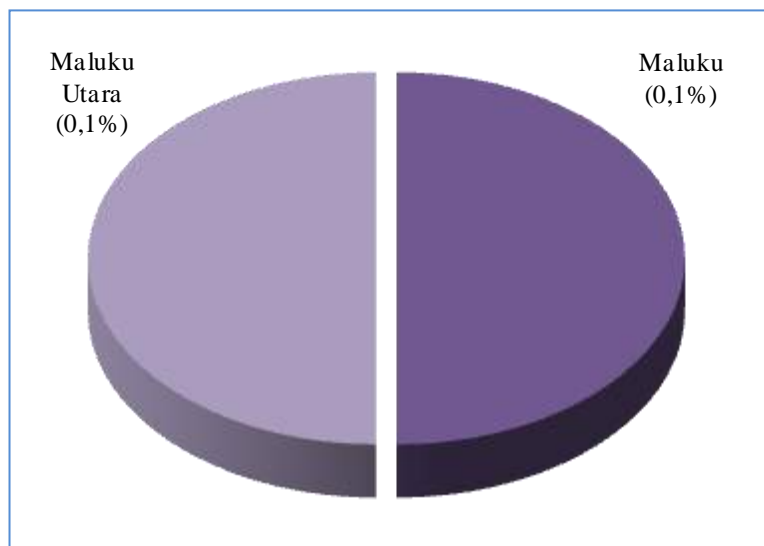
GAMBAR 7.1
KONTRIBUSI EKONOMI WILAYAH MALUKU MENURUT SEKTOR
ATAS DASAR HARGA BERLAKU TRIWULAN I TAHUN 2008



Sumber : Badan Pusat Statistik (diolah)

Secara keseluruhan kontribusi perekonomian wilayah Maluku terhadap perekonomian nasional pada tahun 2008 sekitar 0,2 persen. Sementara itu, kontribusi perekonomian provinsi di wilayah Maluku terhadap perekonomian wilayah nasional adalah sebesar 50 persen dari Provinsi Maluku dan 50 persen dari Maluku Utara. Meskipun masih memiliki kontribusi pertumbuhan ekonomi nasional yang rendah, provinsi di wilayah Maluku memiliki potensi yang cukup tinggi dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan mempertimbangkan karakteristik lokasi wilayah dan sumberdaya alam yang dimiliki.

GAMBAR 7.2
KONTRIBUSI EKONOMI WILAYAH MALUKU TERHADAP EKONOMI NASIONAL
ATAS DASAR HARGA BERLAKU TAHUN 2008



Sumber : Badan Pusat Statistik (diolah)

Investasi di wilayah Maluku didominasi oleh sektor perkebunan, perikanan, pertambangan dan penggalian, perdagangan, hotel dan restoran. Di provinsi Maluku Utara investasi didominasi oleh sektor pertambangan dan penggalian, perkebunan, perdagangan, hotel dan restoran. Perkembangan investasi berupa penanaman modal asing (PMA) di wilayah Maluku terhadap total PMA nasional masih sangat rendah. Kondisi yang sama terjadi pada PMDN yang masih cukup rendah. Meskipun investasi masih tergolong rendah, namun perkembangan perdagangan luar negeri provinsi Maluku dan Maluku Utara terus mengalami peningkatan. Antara tahun 2002 dan 2006, nilai ekspor provinsi Maluku telah meningkat sebesar 22 persen atau rata-rata sekitar 5 persen per tahun.

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, PDRB perkapita wilayah Maluku terus mengalami peningkatan yang signifikan, tetapi pendapatan perkapita wilayah Maluku masih sangat rendah jika dibanding dengan wilayah yang lain (**Tabel 7.2**).

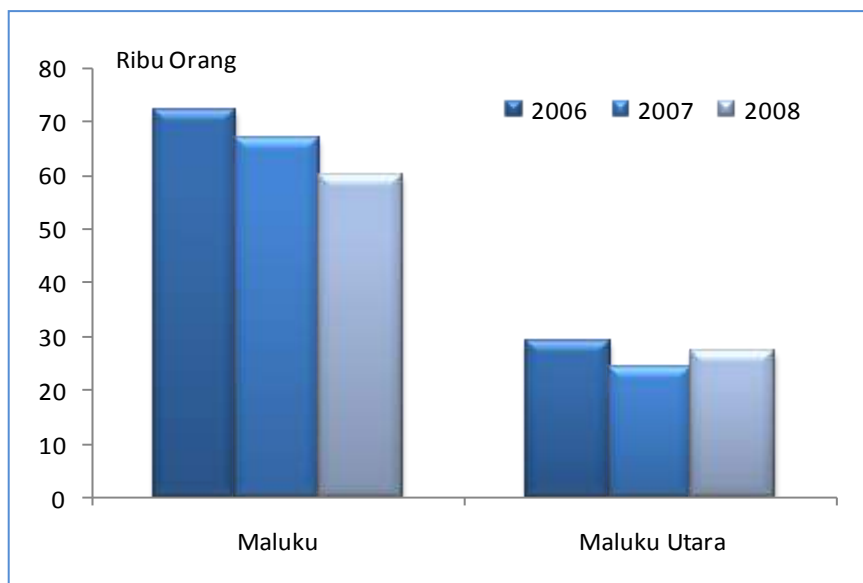
TABEL 7.2
PDRB PERKAPITA DENGAN MIGAS WILAYAH MALUKU TAHUN 2004—2008
ATAS DASAR HARGA KONSTAN TAHUN 2000 (DALAM RIBU RUPIAH)

Tahun	Maluku	Maluku Utara
2004	2,494	2,438
2005	2,577	2,447
2006	2,680	2,540
2007	2,791	2,649
2008	2,867	2,762

Sumber : Badan Pusat Statistik

Jumlah penduduk di wilayah Maluku adalah sekitar 2,4 juta jiwa atau 1,1 persen dari total penduduk nasional, dengan kepadatan 30 jiwa per km². Persebaran penduduk di wilayah Maluku tidak merata. Pada wilayah pulau-pulau kecil cenderung padat sedangkan di pulau besar penduduknya jarang. Sebagian besar penduduk Maluku tersebar di perdesaan. Jumlah pengangguran di Maluku masih tergolong tinggi. Jumlah pengangguran terbuka di Provinsi Maluku tahun 2008 lebih tinggi jika dibandingkan dengan Maluku Utara. Jumlah pengangguran di Provinsi Maluku tahun 2008 sebanyak 60 ribu jiwa, sedangkan di Maluku Utara sebanyak 27 ribu jiwa. Pengangguran dan kemiskinan di wilayah Maluku, erat kaitannya dengan dampak dari konflik sosial berkepanjangan sejak tahun 1999, terutama di Provinsi Maluku. Para pengungsi yang masih tersebar juga belum pulih dari trauma konflik bertahun-tahun tersebut. Pengangguran di Provinsi Maluku Utara dipengaruhi oleh angkatan kerja dan pengangguran pada tahun sebelumnya. Respon pengangguran terhadap angkatan kerja adalah elastis baik jangka pendek maupun jangka panjang.

GAMBAR 7.3
JUMLAH PENGANGGURAN WILAYAH MALUKU TAHUN 2006—2008



Sumber : Badan Pusat Statistik (diolah)

Di samping masih tingginya angka pengangguran, angka kemiskinan pun menunjukkan angka yang masih tinggi walaupun mengalami penurunan dari rentang waktu tahun 2007—2009 . Persentase penduduk miskin di Provinsi Maluku sebesar 28,2 persen di tahun 2009 dan di Provinsi Maluku Utara sebesar 10,4 persen di tahun 2009 (**Tabel 7.3**). Tingginya angka kemiskinan berkaitan dengan belum memadainya jangkauan dan mutu pelayanan kesehatan dan pendidikan.

TABEL 7.3
PERSENTASE KEMISKINAN WILAYAH MALUKU TAHUN 2007—2009

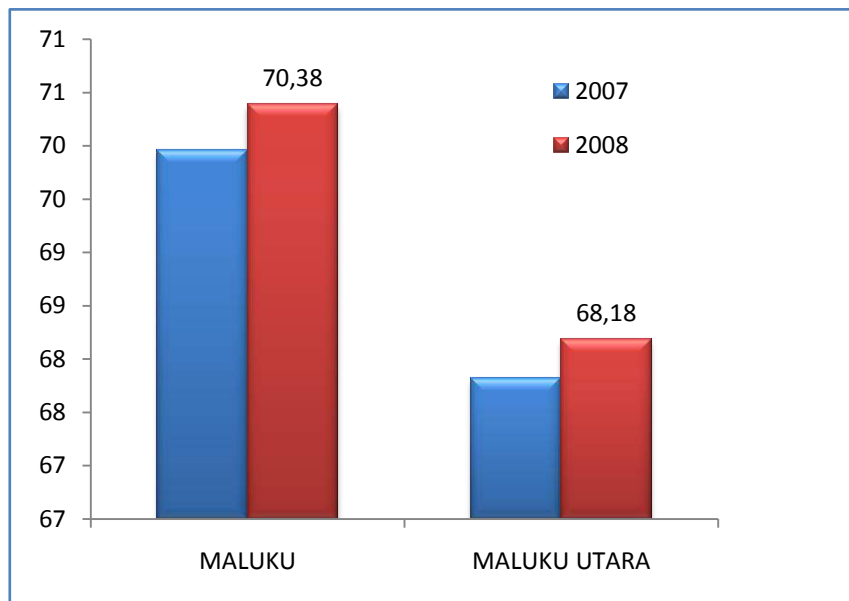
Tahun	Maluku	Maluku Utara
2007	31,1	12,0
2008	29,7	11,3
2009	28,2	10,4

Sumber : Badan Pusat Statistik

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) wilayah Maluku tergolong menengah ke

atas, yaitu mencapai 70,38 pada tahun 2008 di Provinsi Maluku, dan 68,18 di Maluku Utara. Dalam perkembangan IPM, persoalannya lebih banyak muncul dalam aspek kesehatan. Perkembangan IPM Wilayah Maluku pada tahun 2007—2008 dapat dilihat pada Gambar 7.4 sebagai berikut.

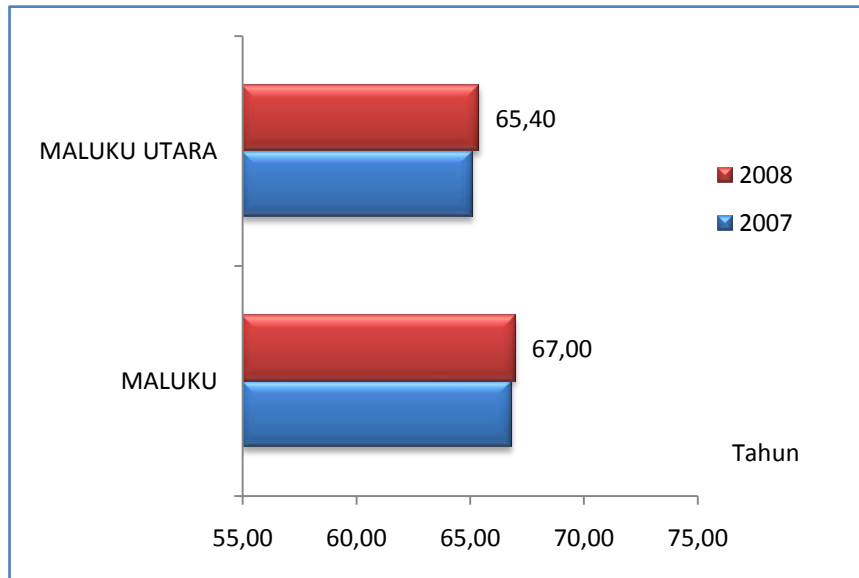
GAMBAR 7.4
INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA WILAYAH MALUKU TAHUN 2007-2008



Sumber : Badan Pusat Statistik (diolah)

Dalam aspek kesehatan, nilai Umur Harapan Hidup (UHH) di wilayah Maluku masih tergolong rendah. Nilai UHH di Provinsi Maluku pada tahun 2008 adalah 67 tahun dan di provinsi Maluku Utara adalah 65,40 tahun. Di wilayah Maluku, dihadapi permasalahan berupa rendahnya pemenuhan gizi ibu, bayi, dan balita dari keluarga miskin, serta rendahnya kesadaran perilaku hidup bersih dan sehat. Permasalahan ini disebabkan oleh kurang optimalnya pelayanan kesehatan sebagai konsekuensi dari jauhnya lokasi pelayanan dari pusat layanan, kurangnya sarana transportasi, serta kurang memadainya sarana kesehatan dan tenaga kesehatan.

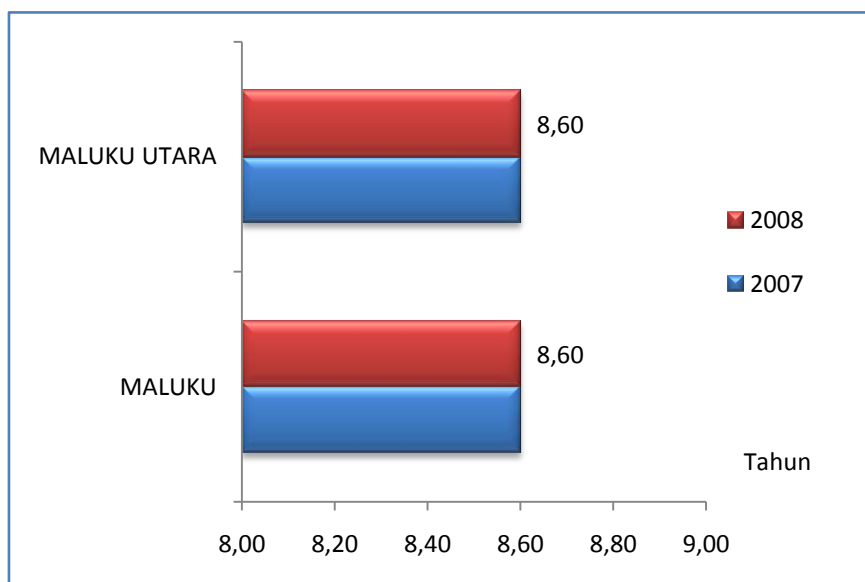
GAMBAR 7.5
UMUR HARAPAN HIDUP WILAYAH MALUKU TAHUN 2007—2008



Sumber : Badan Pusat Statistik (diolah)

Di wilayah Maluku masih terdapat masalah pendidikan sebagaimana diindikasikan oleh angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS) yang masih rendah. Nilai RLS tahun 2008 di Provinsi Maluku dan Maluku Utara adalah 8,60 tahun. Perkembangan angka rata-rata lama sekolah di wilayah Maluku dapat dilihat pada Gambar 7.6 sebagai berikut.

GAMBAR 7.6
RATA-RATA LAMA SEKOLAH WILAYAH MALUKU TAHUN 2007-2008

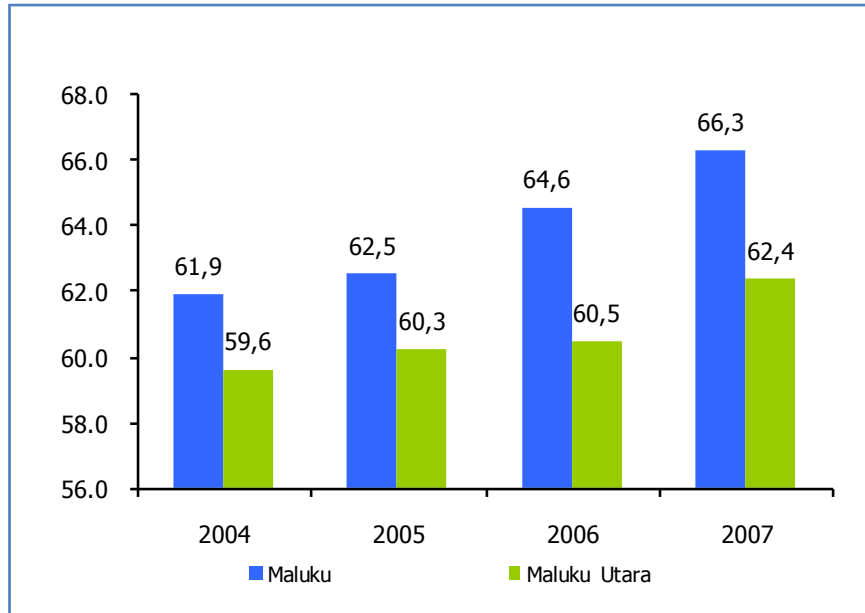


Sumber : Badan Pusat Statistik (diolah)

Demikian juga dengan Indeks Pembangunan Gender (IPG) (*Gender-related Development Index/GDI*) Indonesia, yang dihitung berdasarkan variabel yang sama dengan IPM menurut jenis kelamin. IPG di wilayah Maluku mengalami peningkatan pada tahun 2007. IPG di Provinsi Maluku; yaitu sebesar 66,3, berada di atas rata-rata nasional sebesar 65,8. Sementara, di Maluku Utara nilai tersebut masih di bawah rata-rata nasional sebesar 62,4. Rendahnya nilai tersebut disebabkan oleh rendahnya persentase kontribusi dalam pendapatan dan umur harapan hidup perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa masih terjadi kesenjangan gender antarprovinsi di wilayah Maluku.

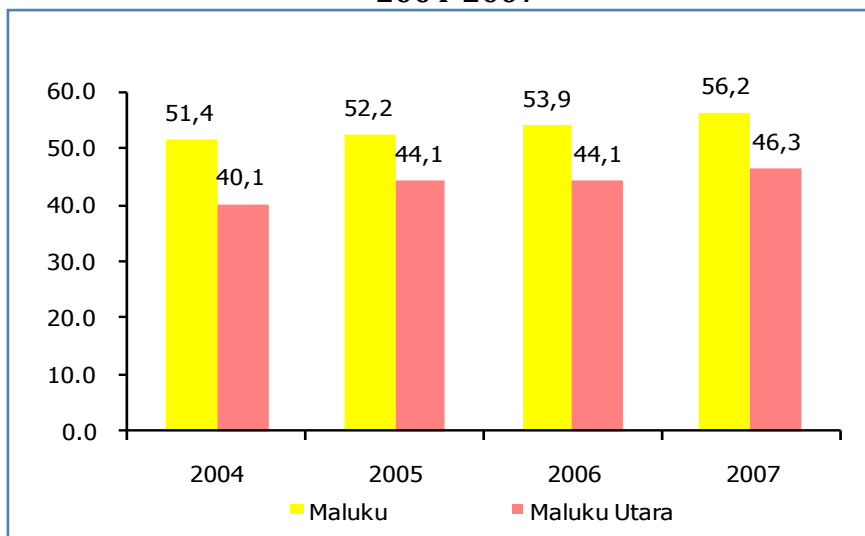
Selain indikator IPG, pembangunan gender juga ditunjukkan dengan indikator *Gender Empowerment Measurement* (GEM) atau Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), yang diukur melalui partisipasi perempuan di bidang ekonomi, politik, dan pengambilan keputusan. Di wilayah Maluku, IDG tahun 2007 masing-masing provinsi juga mengalami peningkatan jika dibanding dengan tahun 2006. Meskipun nilainya masih lebih rendah dengan rata-rata nasional sebesar 62,1. Nilai IDG untuk Provinsi Maluku dan Maluku Utara masing-masing sebesar 56,2 dan 46,3. Rendahnya nilai tersebut disebabkan oleh rendahnya keterwakilan perempuan di parlemen, proporsi perempuan dalam pekerjaan profesional, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), dan upah nonpertanian perempuan. Di samping itu, upaya-upaya perlindungan perempuan dan anak, terutama terhadap berbagai tindak kekerasan, juga perlu ditingkatkan, mengingat bahwa hal tersebut merupakan salah satu prioritas lainnya di bidang kesejahteraan rakyat.

GAMBAR 7.7
PERKEMBANGAN INDEKS PEMBANGUNAN GENDER WILAYAH MALUKU TAHUN
2004-2007



Sumber: BPS dan Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan (diolah)

GAMBAR 7.8
PERKEMBANGAN INDEKS PEMBERDAYAAN GENDER WILAYAH MALUKU TAHUN
2004-2007



Sumber: BPS dan Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan

Pengembangan wilayah Maluku, sebagai salah satu wilayah kepulauan dengan gugusan pulau kecil yang tersebar dan berbatasan dengan negara tetangga, perlu dilakukan dengan kebijakan dan program yang terpadu dan tepat sesuai dengan potensi yang dimiliki dan berbagai hambatan yang dihadapi. Tantangan terbesar adalah memberikan perhatian yang sama terhadap seluruh wilayah pulau, dan sekaligus membangun keterkaitan antarwilayah pulau dalam satu kesatuan tata ruang wilayah pulau dan laut. Kondisi kepulauan yang tersebar seringkali membuat program pembangunan yang dilaksanakan hanya terfokus pada satu atau beberapa pulau tertentu dengan alokasi program yang tidak memperhatikan keutuhan dan keterpaduan program dalam satu kesatuan tata ruang.

Provinsi Maluku dan Maluku Utara menghadapi permasalahan yang sangat kompleks terutama sebagai akibat ketertinggalan dan keterisolasian. Selain itu, wilayah Maluku tersebar dan dipisahkan oleh perairan sehingga menyebabkan program pembangunan cenderung hanya terpusat pada pulau yang menjadi pusat pemerintahan daerah dan kurang menyebar ke pulau-pulau lainnya. Wilayah yang tersebar juga menghambat mobilitas orang dan barang sebagai akibat dari minimnya jaringan transportasi. Kondisi ini juga menyebabkan rendahnya pengawasan dan pengendalian kondisi ketertiban dan keamanan wilayah, serta memunculkan potensi konflik dan separatisme. Dengan kondisi wilayah yang tersebar dan berbagai hambatan tersebut, pengembangan wilayah Maluku akan memperhitungkan secara sungguh-sungguh karakteristik Provinsi Maluku dan Maluku Utara sebagai suatu kesatuan wilayah kepulauan yang saling berhubungan. Selain itu, optimalisasi koordinasi dan sinergi berbagai kebijakan dan program pembangunan sektoral diarahkan untuk memperkuat keterkaitan antarwilayah.

Wilayah Maluku telah mampu meningkatkan produktivitas padi sawah, tetapi hasil produksinya masih belum dapat memenuhi kebutuhan pangan masyarakat. Peningkatan tersebut terjadi karena adanya intensifikasi pertanian. Kekurangan pangan yang dibutuhkan masih perlu dipasok dari luar daerah. Potensi pengembangan lahan pertanian padi sawah masih besar sehingga produksi padi di wilayah Maluku masih berpeluang untuk ditingkatkan. Hal ini didukung oleh pengembangan kawasan sentra produksi (KSP) padi sawah antara lain di Maluku Tengah dan Pulau Buru, di Provinsi Maluku, dan Maluku Utara.

Provinsi Maluku memiliki potensi pengolahan hasil laut. Sebagian besar masyarakat wilayah Maluku hidup di wilayah perairan dengan sektor perikanan sebagai mata pencaharian mereka. Sektor ini sangat potensial mengingat wilayah Maluku merupakan kepulauan dengan perairan yang sangat luas. Hasil perikanan terdiri atas perikanan tangkap dan hasil perikanan budidaya yang dilakukan oleh masyarakat. Produksi ikan budidaya masih jauh lebih kecil jika dibanding dengan produksi ikan hasil tangkapan, yang didukung oleh sumberdaya laut yang luas. Kegiatan budidaya perikanan di wilayah Maluku terdiri atas budidaya laut, budidaya tambak, budidaya kolam, dan budidaya karamba. Industri pembekuan ikan dan biota perairan lainnya



perlu diarahkan di Kabupaten Maluku Tenggara (Maluku), Maluku Utara dan Halmahera Tengah (Maluku Utara). Permasalahannya ialah masih terbatasnya sarana penangkapan, baik berupa armada, kotak pendingin, maupun tempat penyimpanan pendinginan. Hal ini mengakibatkan kualitas produk perikanan masih rendah jika dibandingkan dengan negara lainnya, begitu pula sistem informasi pemasaran masih belum memadai.

Di Provinsi Maluku Utara terdapat potensi pengolahan hasil kelapa, dengan areal perkebunan kelapa yang mampu menghasilkan kopra dalam jumlah sangat besar. Namun, permasalahan yang dihadapi ialah kurangnya keterampilan para petani sehingga mutu kopra masih rendah. Sebagian besar petani hanya mengolah kelapa menjadi kopra yang kemudian dipasarkan antarprovinsi. Selain itu, banyak pohon kelapa yang sudah tidak produktif sehingga membutuhkan peremajaan tanaman.

Wilayah Maluku masih memiliki permasalahan terkait dengan rendahnya kualitas dan kuantitas ketersediaan sarana dan prasarana, khususnya untuk jalan dan jembatan, serta sarana transportasi. Selain itu, kurangnya keterpaduan transportasi antarmoda menjadi permasalahan utama, khususnya ketersediaan transportasi darat, laut, sungai, dan udara yang belum memadai. Minimnya infrastruktur yang dibangun juga mengakibatkan keterisolasian wilayah antarpulau dan dalam pulau. Di wilayah Maluku, jaringan jalan di pulau-pulau terpencil belum sepenuhnya berfungsi untuk mendukung transportasi lintas pulau dan melayani mobilitas masyarakat dalam mengembangkan potensi wilayah serta mengurangi kemiskinan. Adapun jalan desa yang dapat dilalui kendaraan roda empat sepanjang tahun masih belum memadai. Selain itu, armada angkutan jalan raya sangat terbatas karena armada yang tersedia tidak sebanding dengan luas daratan pada setiap kabupaten. Jangkauan kapal PELNI, kapal ferry, perintis, dan kapal pelayaran rakyat (Pelra) masih sangat terbatas dan tidak memadai untuk kondisi geografis wilayah Maluku yang terdiri atas pulau-pulau kecil, sedang, dan besar.

Sementara itu, permasalahan sumber daya alam yang perlu segera ditangani menyangkut perusakan hutan, pembalakan hutan, dan kebakaran hutan. Permasalahan utama lainnya adalah kecenderungan terjadinya beberapa bencana alam, seperti banjir, longsor dan kekeringan akibat perusakan dan pencemaran lingkungan hidup dan juga terjadinya perubahan iklim global. Berbagai permasalahan tersebut dapat diakibatkan oleh eksploitasi terhadap sumber daya alam, seperti kegiatan penambangan, eksploitasi sumber daya laut dan pantai, serta buruknya manajemen daerah aliran sungai.

Penggunaan tanah di wilayah Maluku didominasi oleh kawasan hutan sebanyak 60,7 persen, baik di Provinsi Maluku maupun di Maluku Utara yang masing-masing 73,3 persen luas lahan Provinsi Maluku Utara dan 53,3 persen dari total luas daratan Provinsi Maluku. Secara umum penggunaan lahan di wilayah Maluku masih belum termanfaatkan secara intensif dan masih sangat potensial untuk meningkatkan peruntukan/pemanfaatan lahan untuk perkebunan, pertanian lahan kering, dan persawahan. Sebagian besar lahan kawasan lindung masih belum ditetapkan dengan

peraturan pemerintah dan masih tersedia untuk penggunaannya sesuai dengan kesesuaiannya, karena luas wilayah Provinsi Maluku masih sangat besar jika dibandingkan dengan Maluku Utara.

Wilayah perairan Kepulauan Maluku di bagian selatan berbatasan dengan negara Timor Leste dan Australia. Terdapat beberapa segmen garis batas yang belum disepakati antar RI dengan Timor Leste, sedangkan di bagian utara Kepulauan Maluku masih ada garis batas maritim yang belum disepakati antara Pemerintah RI dengan Filipina. Pada satu sisi terdapat mobilitas penduduk tradisional dari Timor Leste ke Pulau Wetar, Pulau Kisar (Kabupaten Maluku Barat Daya) dan Pulau Larat (Kabupaten Maluku Tenggara Barat).

GAMBAR 7.9
DAERAH TERTINGGAL DI WILAYAH MALUKU



Sumber : Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal (diolah)

Di sisi lain perjanjian lintas batas RI-Timor Leste tidak memasukkan wilayah Maluku sebagai pintu lintas batas. Akibatnya penduduk yang melakukan mobilitas tradisional dianggap sebagai pendatang ilegal karena tidak dilengkapi dengan dokumen keimigrasian yang sah. Akan tetapi di sisi lain terjadi *illegal fishing* karena kurangnya pengamanan terhadap wilayah perairan. Dalam hal ini perhatian pemerintah pusat dan daerah terhadap penanganan kawasan perbatasan dan batas wilayah perlu/harus

ditingkatkan. Keterpaduan antarsektor dan antardaerah dalam penanganan kawasan perbatasan dan batas wilayah juga masih perlu ditingkatkan.

7.1.2 Isu Strategis

Dari uraian fakta, potensi dan permasalahan di wilayah Maluku, dapat ditarik beberapa isu strategis di wilayah Maluku sebagai berikut:

1. Optimalisasi pengembangan sektor dan komoditas unggulan.

Hal ini ditunjukkan oleh belum optimalnya pengembangan industri pengolahan hasil laut di Provinsi Maluku, dan belum optimalnya penanganan industri pengolahan kelapa di Maluku Utara. Hal ini ditunjukkan pula oleh rendahnya akses terhadap infrastruktur pendukung ekonomi, khususnya akses terhadap jalan, akses terhadap pelabuhan, akses terhadap prasarana listrik, dan akses masyarakat terhadap prasarana dan sarana pos dan telematika.

2. Pembangunan wilayah perbatasan, tertinggal dan pulau terpencil, dan kawasan bencana.

Hal ini ditunjukkan oleh meningkatnya kebutuhan pembangunan di wilayah perbatasan, rendahnya jumlah dan menurunnya persentase kredit usaha kecil di Provinsi Maluku dan Maluku Utara, kurangnya akses penduduk terhadap sarana dan prasarana di Provinsi Maluku dan Maluku Utara, dan luasnya kawasan bencana.

3. Rendahnya kinerja birokrasi dan tata kelola.

Hal ini berkaitan dengan rendahnya kapasitas Pemda dalam menjalankan tata pemerintahan yang baik, dan secara khusus terkait dengan rendahnya akses masyarakat terhadap informasi tata ruang di Provinsi Maluku.

4. Kualitas sumberdaya manusia

Isu strategis ini berkaitan dengan rendahnya akses terhadap pendidikan dasar dan menengah, rendahnya status kesehatan dan gizi masyarakat, serta rendahnya pendapatan per kapita di Provinsi Maluku dan Maluku Utara.

5. Tingginya dampak konflik Maluku terhadap keamanan lingkungan, kehidupan sosial dan ekonomi, serta lingkungan.

Lebih jauh lagi muncul persentase yang tinggi pada pengangguran, kemiskinan, dan modal sosial sebagai konsekuensi dari konflik sosial di Provinsi Maluku.

6. Ketergantungan pasokan pangan dari luar wilayah sebagai konsekuensi menurunnya luas areal dan produksi tanaman pangan.

Hal ini berkaitan dengan rendahnya luas panen dan produksi tanaman pangan di Provinsi Maluku Utara.

7. Konservasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup serta Mitigasi Bencana.

Hal ini berkaitan dengan meningkatnya kebutuhan energi, dan tingginya perambahan hutan dan gangguan lingkungan.

7.2 Arah Pengembangan Wilayah

Dengan memperhatikan rancangan Rencana Tata Ruang Wilayah Kepulauan Maluku, pengembangan wilayah Maluku diarahkan untuk: (1) mengembangkan kota-kota pesisir sebagai pusat pelayanan kegiatan industri kemaritiman terpadu yang merupakan sektor basis dengan dukungan prasarana dan sarana yang memadai, khususnya transportasi, energi, dan sumber daya air; (2) mengembangkan wilayah darat, laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil sebagai satu kesatuan wilayah Kepulauan Maluku melalui kegiatan pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang yang terpadu yang didukung oleh prasarana dan sarana yang memadai; (3) mempertahankan kawasan konservasi untuk menjamin daya dukung lingkungan yang optimal bagi pengembangan wilayah; (4) memacu pertumbuhan ekonomi wilayah Kepulauan Maluku melalui pengembangan sektor-sektor unggulan yang berbasis sumber daya setempat dan meningkatkan keterkaitan antara pusat-pusat pertumbuhan di darat, pesisir, dan pulau-pulau kecil; (5) memanfaatkan sumber daya alam secara produktif dan efisien, agar terhindar dari pemborosan sehingga dapat memberi manfaat sebesar-besarnya berdasarkan prinsip kelestarian; serta (6) meningkatkan ketersediaan, kualitas, dan memperluas jangkauan pelayanan prasarana dasar, khususnya transportasi laut dan udara yang didukung oleh transportasi antarmoda secara terpadu dan optimal dengan mengikutsertakan dunia usaha.

Pengembangan sistem pusat permukiman di wilayah Maluku ditekankan pada terbentuknya fungsi dan hirarki pusat permukiman sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) yang meliputi Pusat Kegiatan Nasional (PKN), Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), Pusat Kegiatan Lokal (PKL) dan Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) di kawasan perbatasan negara. Pengembangan Pusat Kegiatan Nasional (PKN) di wilayah Maluku diarahkan untuk mengendalikan pengembangan kota Ambon dan Ternate – Sofifi sebagai pusat pelayanan primer yang sesuai dengan daya dukung lingkungannya.

Pengembangan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) di wilayah Maluku diarahkan untuk: (1) mengembangkan pusat industri pengolahan hasil kelautan dan perikanan melalui pembangunan prasarana dan sarana perkotaan dan permukiman; (2) mengendalikan perkembangan kota Masohi, Namlea, dan Tual sebagai pusat pelayanan primer yang sesuai dengan daya dukung lingkungannya; dan (3) mendorong pengembangan kota Tidore, Tobelo, Labuha, Sanana, Werinama, dan Kairatu sebagai pusat pelayanan sekunder.



Pengembangan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) di wilayah Maluku diarahkan untuk (1) meningkatkan pelayanan prasarana dan sarana kota yang mendukung fungsi kota sebagai pusat pelayanan kawasan perdesaan di sekitarnya; (2) mendorong terciptanya keterkaitan sosial ekonomi antara kawasan perkotaan dan perdesaan yang saling menguntungkan; dan (3) prioritas penanganan kota-kota Pusat Kegiatan Lokal (PKL) ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi masing-masing sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pusat permukiman Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) di Kepulauan Maluku. Pengembangan Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) di wilayah Maluku diarahkan untuk mendorong perkembangan kota Ilwaki, Saumlaki, Daruba, dan Dobo sebagai pusat pelayanan sekunder.

7.3 Tujuan dan Sasaran Pengembangan Wilayah

Berdasarkan arahan pengembangan wilayah Maluku, tujuan pembangunan wilayah Maluku untuk kurun waktu 2010—2014 adalah untuk:

1. meningkatkan standar hidup masyarakat Maluku dan Maluku Utara.
2. meningkatkan produktivitas dan pemanfaatan sumber daya laut dan perkebunan di wilayah Maluku.
3. meningkatkan ketersediaan, kualitas, dan jangkauan pelayanan prasarana dan sarana transportasi, baik darat, laut maupun udara.
4. mewujudkan keseimbangan pembangunan wilayah Maluku bagian Utara dan bagian Selatan, wilayah darat, pesisir, dan pulau-pulau kecil.

Sasaran pengembangan wilayah Maluku untuk kurun waktu 2010—2014 adalah sebagai berikut:

1. meningkatnya standar hidup masyarakat wilayah Maluku, yang ditunjukkan dengan membaiknya berbagai indikator pembangunan, yaitu pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, pengangguran, angka kematian bayi, angka harapan hidup, pengangguran serta pendapatan perkapita.
2. meningkatnya produksi dan produktivitas sektor perikanan di wilayah Maluku.
3. berkembangnya jaringan dan meningkatnya transportasi.
4. mewujudkan keseimbangan pembangunan wilayah Maluku bagian Utara dan bagian Selatan.
5. mewujudkan keseimbangan pembangunan wilayah darat, pesisir dan pulau-pulau kecil.

TABEL 7.4
SASARAN PERTUMBUHAN EKONOMI, KEMISKINAN DAN PENGANGGURAN
DI WILAYAH MALUKU TAHUN 2010—2014

Provinsi	Pertumbuhan Ekonomi (%) ¹⁾		Kemiskinan (%) ²⁾		Pengangguran (%) ³⁾	
	2010	2014	2010	2014	2010	2014
Maluku	4,9 – 5,4	5,4 – 6,0	27,04 – 26,75	22,23 – 21,76	7,7 – 8,5	5,2 – 5,8
Maluku Utara	5,5 – 6,3	6,0 – 6,8	9,45 – 9,07	5,38 – 5,02	4,7 – 5,1	3,0 – 3,3

Sumber : Perhitungan Bappenas;BPS; Susenas;

*Keterangan: ¹⁾ *Pertumbuhan Ekonomi: persentase laju perubahan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).*

²⁾ *Kemiskinan: persentase jumlah penduduk miskin terhadap total jumlah penduduk.*

³⁾ *Pengangguran: persentase jumlah pengangguran terbuka terhadap total angkatan kerja.*

TABEL 7.5
SASARAN ANGKA KEMATIAN BAYI, ANGKA HARAPAN HIDUP,
RATA-RATA LAMA SEKOLAH DAN PENDAPATAN PERKAPITA
DI WILAYAH MALUKU TAHUN 2010—2014

Provinsi	Angka Kematian Bayi ¹⁾		Rata-Rata Lama Sekolah ²⁾		Angka Harapan Hidup ³⁾		Pendapatan Perkapita (Rp.Ribu) ⁴⁾	
	2010	2014	2010	2014	2010	2014	2010	2014
Maluku	32	28	9,00	9,40	69,12	70,18	3,240.87	3,955.22
Maluku Utara	35	29	9,00	9,40	68,42	69,91	2,998.35	3,537.59

Sumber : Perhitungan Bappenas;BPS; Susenas;

*Keterangan: ¹⁾ *Angka Kematian Bayi: jumlah bayi yang meninggal sebelum mencapai usia 1 tahun per 1000 kelahiran hidup.*

²⁾ *Rata-rata Lama Sekolah: rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani.*

³⁾ *Angka Harapan Hidup: perkiraan lama hidup rata-rata penduduk.*

⁴⁾ *Pendapatan per kapita: pendapatan regional dibagi dengan jumlah penduduk pada pertengahan tahun.*

7.4 Arah Kebijakan dan Strategi Pengembangan

Berdasarkan arahan, tujuan, dan sasaran serta dengan mempertimbangkan isu strategis wilayah Maluku, maka arah kebijakan dan strategi wilayah Maluku kurun waktu 2010—2014 adalah sebagai berikut:

1. Pengembangan sentra produksi komoditas unggulan, dengan strategi pengembangan:
 - a. meningkatkan produktivitas usaha perikanan tangkap dan budidaya.
 - b. diversifikasi produk ke arah ikan siap saji untuk pasar dalam dan luar negeri.
 - c. mengembangkan kluster industri perikanan dengan Ambon sebagai pusat industri pengolahan.
 - d. penganekaragaman produk olahan kelapa.
 - e. mengembangkan kluster industri kelapa dengan Sofifi sebagai pusat industri pengolahan.
2. Penguatan kedaulatan wilayah nasional melalui pendekatan kesejahteraan dan keamanan, dengan strategi pengembangan:
 - a. meningkatkan stabilitas keamanan kawasan perbatasan.
 - b. mengembangkan kegiatan ekonomi di wilayah perbatasan, tertinggal dan pulau terpencil.
3. Peningkatan reformasi birokrasi dan tata kelola, dengan strategi pengembangan:
 - a. meningkatkan kualitas regulasi dan peraturan daerah.
 - b. meningkatkan penegakan hukum dan HAM termasuk penanganan kasus korupsi.
 - c. meningkatkan kualitas pelayanan publik.
4. Peningkatan kualitas sumber daya manusia untuk mendukung ketersediaan angkatan kerja berketerampilan dan berpendidikan tinggi, dengan strategi pengembangan:
 - a. meningkatkan akses pelayanan pendidikan dan keterampilan kerja.
 - b. meningkatkan akses pelayanan kesehatan.
 - c. meningkatkan produktivitas angkatan kerja dan mengembangkan ekonomi lokal.
5. Peningkatan harmoni kehidupan masyarakat dengan kemajemukan agama dan golongan, dengan strategi pengembangan:

- a. meningkatkan kapasitas lembaga keswadayaan masyarakat (Maluku).
 - b. memulihkan modal sosial dan rasa saling percaya ditengah masyarakat (Maluku).
6. Percepatan pemulihan kondisi sosial ekonomi masyarakat, dengan strategi pengembangan
 - a. meningkatkan sektor-sektor yang menyerap banyak tenaga kerja.
7. Peningkatan ketahanan pangan di tingkat wilayah, dengan strategi pengembangan:
 - a. meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman pangan.
 - b. memperkuat interaksi perdagangan antar wilayah.
 - c. diversifikasi pangan.
8. Pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan hidup secara berkelanjutan, dengan strategi pengembangan:
 - a. meningkatkan konservasi sumber daya alam dan lingkungan hidup.
9. Peningkatan kewaspadaan dini terhadap potensi bencana alam, dengan strategi pengembangan:
 - a. mitigasi bencana alam.

MATRIK BUKU III RPJMN 2010-2014 WILAYAH MALUKU
ISU STRATEGIS, ARAH KEBIJAKAN, WILAYAH, STRATEGI PEMBANGUNAN, DAN FOKUS PRIORITAS

ISU STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN	WILAYAH	STRATEGI PENGEMBANGAN	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS
<p>Optimalisasi pengembangan sektor dan komoditas unggulan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Belum optimalnya peran industri unggulan hasil laut sebagai penggerak perekonomian Provinsi Maluku dan Maluku Utara • Belum optimalnya industri unggulan kelapa sebagai motor penggerak perekonomian Provinsi Maluku Utara 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan sentra produksi komoditas unggulan 	<ul style="list-style-type: none"> • Maluku • Maluku Utara 	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan produktivitas usaha perikanan tangkap dan budidaya 	<p>Prioritas Nasional</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan areal pertanian baru. • Pembangunan dan pemeliharaan sarana transportasi dan angkutan yang melayani daerah-daerah sentra produksi pertanian demi peningkatan kuantitas dan kualitas produksi serta kemampuan pemasarannya. • Pembangunan dan pemeliharaan pengairan yang melayani daerah-daerah sentra produksi pertanian demi peningkatan kuantitas dan kualitas produksi • Pembangunan dan pemeliharaan jaringan listrik yang melayani daerah-daerah sentra produksi pertanian demi peningkatan kuantitas dan kualitas produksi • Pembangunan dan pemeliharaan teknologi komunikasi dan sistem informasi nasional yang melayani daerah-daerah sentra produksi pertanian demi peningkatan kuantitas dan kualitas produksi serta kemampuan pemasarannya • Peningkatan upaya penelitian dan pengembangan bidang pertanian yang mampu menciptakan benih unggul dan hasil penelitian lainnya menuju kualitas dan produktivitas hasil pertanian nasional yang tinggi • Penyediaan pembiayaan yang terjangkau • Sistem subsidi yang menjamin ketersediaan benih varietas unggul yang teruji, pupuk, teknologi dan sarana pasca panen yang sesuai secara tepat waktu, tepat jumlah, dan terjangkau

ISU STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN	WILAYAH	STRATEGI PENGEMBANGAN	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS
				<ul style="list-style-type: none"> • Penyelesaian pembangunan Lintas Maluku • Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya • Penyediaan Jasa Telekomunikasi • Peningkatan Deregulasi Kebijakan • Pengembangan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) • Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Penanaman Modal • Administrasi Badan Hukum • Revitalisasi Pasar Tradisional • Pengembangan dan penetapan sistem logistik nasional yang menjamin kelancaran arus barang dan mengurangi biaya transaksi/ekonomi biaya tinggi • Koordinasi pengembangan urusan penataan ruang dan pengembangan wilayah • Penetapan kebijakan energi yang memastikan penanganan energi nasional yang terintegrasi sesuai dengan Rencana Induk Energi Nasional • Peningkatan kapasitas pembangkit listrik melalui Pembangkit PLTD (Unit/kW) • Peningkatan kapasitas pembangkit listrik melalui Jaringan Transmisi Tenaga Listrik (kms) • Peningkatan kapasitas pembangkit listrik melalui Gardu Induk Transmisi Tenaga Listrik (kms) • Peningkatan kapasitas pembangkit listrik melalui Gardu Distribusi kVA • Peningkatan kapasitas pembangkit listrik melalui JTM • Peningkatan kapasitas pembangkit listrik melalui JTR

ISU STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN	WILAYAH	STRATEGI PENGEMBANGAN	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS
			<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kapasitas PLTP terpasang • Pelaksanaan Survei Umum di Wilayah Terbuka <p>Prioritas Pulau</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan penguasaan teknologi perikanan tangkap dan budidaya • Pengembangan insentif bagi konsolidasi usaha perikanan skala mikro dan kecil • Peningkatan akses permodalan khususnya bagi nelayan skala mikro dan kecil 	<p>Prioritas Nasional</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan dan pemeliharaan jaringan listrik yang melayani daerah-daerah sentra produksi pertanian demi peningkatan kuantitas dan kualitas produksi • Dorongan untuk investasi pangan, pertanian, dan industri perdesaan berbasis produk lokal oleh pelaku usaha dan pemerintah • Penyediaan pembiayaan yang terjangkau • Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku • Penetapan kebijakan energi yang memastikan penanganan energi nasional yang terintegrasi sesuai dengan Rencana Induk Energi Nasional • Peningkatan kapasitas pembangkit listrik melalui Pembangkit PLTD (Unit/kW) • Peningkatan kapasitas pembangkit listrik melalui Jaringan Transmisi Tenaga Listrik (kms) • Peningkatan kapasitas pembangkit listrik melalui Gardu Induk Transmisi Tenaga Listrik
			<ul style="list-style-type: none"> • Diversifikasi produk ke arah ikan siap saji untuk pasar dalam dan luar negeri 	

ISU STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN	WILAYAH	STRATEGI PENGEMBANGAN	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS
				(kms) <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kapasitas pembangkit listrik melalui Gardu Distribusi kVA • Peningkatan kapasitas pembangkit listrik melalui JTM • Peningkatan kapasitas pembangkit listrik melalui JTR • Peningkatan kapasitas PLTP terpasang • Pelaksanaan Survei Umum di Wilayah Terbuka Prioritas Pulau <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan penguasaan teknologi pengolahan • Pengembangan kerjasama antara dunia usaha dan perguruan tinggi/lembaga penelitian dalam penelitian teknologi tepat guna
			<ul style="list-style-type: none"> • Mengembangkan kluster industri perikanan dengan Ambon sebagai pusat industri pengolahan 	Prioritas Nasional <ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan dan pemeliharaan sarana transportasi dan angkutan yang melayani daerah-daerah sentra produksi pertanian demi peningkatan kuantitas dan kualitas produksi serta kemampuan pemasarannya • Pembangunan dan pemeliharaan jaringan listrik yang melayani daerah-daerah sentra produksi pertanian demi peningkatan kuantitas dan kualitas produksi • Pembangunan dan pemeliharaan teknologi komunikasi dan sistem informasi nasional yang melayani daerah-daerah sentra produksi pertanian demi peningkatan kuantitas dan kualitas produksi serta kemampuan pemasarannya • Dorongan untuk investasi pangan, pertanian, dan industri perdesaan berbasis produk lokal oleh pelaku usaha dan pemerintah • Penyediaan pembiayaan yang terjangkau

ISU STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN	WILAYAH	STRATEGI PENGEMBANGAN	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS
				<ul style="list-style-type: none"> • Penyelesaian pembangunan Lintas Maluku • Pembangunan jaringan prasarana dan penyediaan sarana transportasi antar moda dan antar pulau yang terintegrasi sesuai dengan sistem transportasi nasional dan cetak biru transportasi multimoda • Penurunan tingkat kecelakaan transportasi • Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku • Penuntasan pembangunan jaringan serat optik di Indonesia Bagian Timur sebelum 2013 • Penyediaan Jasa Telekomunikasi • Peningkatan Deregulasi Kebijakan • Pengembangan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) • Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Penanaman Modal • Administrasi Badan Hukum • Revitalisasi Pasar Tradisional • Koordinasi Penataan dan Pengembangan Sistem Logistik Nasional • Pengembangan dan penetapan sistem logistik nasional yang menjamin kelancaran arus barang dan mengurangi biaya transaksi/ekonomi biaya tinggi • Pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan di bidang lalu lintas dan angkutan laut (Pembangunan kapal perintis dan subsidi operasi perintis) • Pengelolaan dan pembangunan kegiatan di bidang pelabuhan dan pengerukan • Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Jalan Nasional • Pengelolaan Fasilitas Ekspor dan Impor

ISU STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN	WILAYAH	STRATEGI PENGEMBANGAN	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS
				<ul style="list-style-type: none"> • Perumusan Kebijakan dan Pengembangan Teknologi Informasi Kepabeanaan dan Cukai • Pengembangan sertifikasi sistem elektronik jasa aplikasi dan konten untuk mendukung transaksi elektronik • Koordinasi pengembangan dan penerapan sistem National Single Window/NSW dan ASEAN Single Window/ASW • Koordinasi pengembangan urusan penataan ruang dan pengembangan wilayah • Menyempurnaan peraturan ketenagakerjaan dan sinkronisasi kebijakan ketenagakerjaan (pusat) dengan kebijakan/ peraturan daerah • Penguatan lembaga hubungan industrial: (a) mendorong pembentukan lembaga bipartite; (b) Penguatan perundingan antara perwakilan pekerja dan pengusaha dengan meningkatkan teknik-teknik bernegosiasi; (c) Peningkatan kualitas penyelesaian perselisihan • Penerapan Keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di perusahaan sesuai standard an manajemen K3 • Penetapan kebijakan energi yang memastikan penanganan energi nasional yang terintegrasi sesuai dengan Rencana Induk Energi Nasional • Peningkatan kapasitas pembangkit listrik melalui Pembangkit PLTD (Unit/kW) • Peningkatan kapasitas pembangkit listrik melalui Jaringan Transmisi Tenaga Listrik (kms) • Peningkatan kapasitas pembangkit listrik melalui Gardu Induk Transmisi Tenaga Listrik (kms) • Peningkatan kapasitas pembangkit listrik melalui Gardu Distribusi kVA • Peningkatan kapasitas pembangkit listrik melalui JTM • Peningkatan kapasitas pembangkit listrik melalui JTR

III.M.7-6

ISU STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN	WILAYAH	STRATEGI PENGEMBANGAN	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS
				<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kapasitas PLTP terpasang • Pelaksanaan Survei Umum di Wilayah Terbuka • Pengembangan Energi Alternatif <ul style="list-style-type: none"> (i) Listrik Desa (EBT) (ii) PLTS Tersebar (iii) PLTS Terpusat (iv) PLTMH (kW) (v) PLT Angin (kW) (vi) Pembangunan unit pengolahan Biofuel (vii) Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman tahunan (Penyediaan Bahan bakar Bio Energi) <p>Prioritas Pulau</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengendalian pengembangan kota Ambon sebagai pusat pelayanan primer yang sesuai dengan daya dukung lingkungannya • Pengembangan kerjasama antardaerah
		<ul style="list-style-type: none"> • Maluku Utara 	<ul style="list-style-type: none"> • Penganekaragaman produk olahan kelapa 	<p>Prioritas Nasional</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan areal pertanian baru • Pembangunan dan pemeliharaan jaringan listrik yang melayani daerah-daerah sentra produksi pertanian demi peningkatan kuantitas dan kualitas produksi • Pembangunan dan pemeliharaan teknologi komunikasi dan sistem informasi nasional yang melayani daerah-daerah sentra produksi pertanian demi peningkatan kuantitas dan kualitas produksi serta kemampuan pemasarannya • Peningkatan upaya penelitian dan pengembangan bidang pertanian yang mampu

ISU STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN	WILAYAH	STRATEGI PENGEMBANGAN	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS
				<p>menciptakan benih unggul dan hasil penelitian lainnya menuju kualitas dan produktivitas hasil pertanian nasional yang tinggi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dorongan untuk investasi pangan, pertanian, dan industri perdesaan berbasis produk lokal oleh pelaku usaha dan pemerintah • Penyediaan pembiayaan yang terjangkau • Sistem subsidi yang menjamin ketersediaan benih varietas unggul yang teruji, pupuk, teknologi dan sarana pasca panen yang sesuai secara tepat waktu, tepat jumlah, dan terjangkau • Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku • Penyediaan Jasa Telekomunikasi • Peningkatan Deregulasi Kebijakan • Pengembangan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) • Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Penanaman Modal • Administrasi Badan Hukum • Revitalisasi Pasar Tradisional • Pengembangan dan penetapan sistem logistik nasional yang menjamin kelancaran arus barang dan mengurangi biaya transaksi/ekonomi biaya tinggi • Penetapan kebijakan energi yang memastikan penanganan energi nasional yang terintegrasi sesuai dengan Rencana Induk Energi Nasional • Peningkatan kapasitas pembangkit listrik melalui Pembangkit PLTD (Unit/kW) • Peningkatan kapasitas pembangkit listrik melalui Jaringan Transmisi Tenaga Listrik

ISU STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN	WILAYAH	STRATEGI PENGEMBANGAN	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS
				(kms) <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kapasitas pembangkit listrik melalui Gardu Induk Transmisi Tenaga Listrik (kms) • Peningkatan kapasitas pembangkit listrik melalui Gardu Distribusi kVA • Peningkatan kapasitas pembangkit listrik melalui JTM • Peningkatan kapasitas pembangkit listrik melalui JTR • Peningkatan kapasitas PLTP terpasang • Pelaksanaan Survei Umum di Wilayah Terbuka <p>Prioritas Pulau</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan penguasaan teknologi pengolahan • Pengembangan kerjasama antara dunia usaha dan perguruan tinggi/lembaga penelitian dalam penelitian teknologi tepat guna
			<ul style="list-style-type: none"> • Mengembangkan kluster industri kelapa dengan Sofifi sebagai pusat industri pengolahan 	<p>Prioritas Nasional</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan dan pemeliharaan sarana transportasi dan angkutan yang melayani daerah-daerah sentra produksi pertanian demi peningkatan kuantitas dan kualitas produksi serta kemampuan pemasarannya • Pembangunan dan pemeliharaan jaringan listrik yang melayani daerah-daerah sentra produksi pertanian demi peningkatan kuantitas dan kualitas produksi • Pembangunan dan pemeliharaan teknologi komunikasi dan sistem informasi nasional yang melayani daerah-daerah sentra produksi pertanian demi peningkatan kuantitas dan

ISU STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN	WILAYAH	STRATEGI PENGEMBANGAN	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS
				<p>kualitas produksi serta kemampuan pemasarannya</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dorongan untuk investasi pangan, pertanian, dan industri perdesaan berbasis produk lokal oleh pelaku usaha dan pemerintah • Penyediaan pembiayaan yang terjangkau • Penyelesaian pembangunan Lintas Maluku • Pembangunan jaringan prasarana dan penyediaan sarana transportasi antar moda dan antar pulau yang terintegrasi sesuai dengan sistem transportasi nasional dan cetak biru transportasi multimoda • Penurunan tingkat kecelakaan transportasi • Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku • Penuntasan pembangunan jaringan serat optik di Indonesia Bagian Timur sebelum 2013 • Penyediaan Jasa Telekomunikasi • Peningkatan Deregulasi Kebijakan • Pengembangan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) • Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Penanaman Modal • Administrasi Badan Hukum • Revitalisasi Pasar Tradisional • Koordinasi Penataan dan Pengembangan Sistem Logistik Nasional • Pengembangan dan penetapan sistem logistik nasional yang menjamin kelancaran arus barang dan mengurangi biaya transaksi/ekonomi biaya tinggi • Pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan di bidang lalu lintas dan angkutan laut

ISU STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN	WILAYAH	STRATEGI PENGEMBANGAN	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS
				<p>(Pembangunan kapal perintis dan subsidi operasi perintis)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengelolaan dan pembangunan kegiatan di bidang pelabuhan dan pengerukan • Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Jalan Nasional • Pengelolaan Fasilitas Ekspor dan Impor Perumusan Kebijakan dan Pengembangan Teknologi Informasi Kepabeanan dan Cukai • Koordinasi pengembangan dan penerapan sistem National Single Window/NSW dan ASEAN Single Window/ASW • Koordinasi pengembangan urusan penataan ruang dan pengembangan wilayah • Menyempurnaan peraturan ketenagakerjaan dan sinkronisasi kebijakan ketenagakerjaan (pusat) dengan kebijakan/ peraturan daerah • Penguatan lembaga hubungan industrial: (a) mendorong pembentukan lembaga bipartite; (b) Penguatan perundingan antara perwakilan pekerja dan pengusaha dengan meningkatkan teknik-teknik bernegosiasi; (c) Peningkatan kualitas penyelesaian perselisihan • Penerapan Keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di perusahaan sesuai standard an manajemen K3 • Penetapan kebijakan energi yang memastikan penanganan energi nasional yang terintegrasi sesuai dengan Rencana Induk Energi Nasional • Peningkatan kapasitas pembangkit listrik melalui Pembangkit PLTD (Unit/kW) • Peningkatan kapasitas pembangkit listrik melalui Jaringan Transmisi Tenaga Listrik (kms) • Peningkatan kapasitas pembangkit listrik melalui Gardu Induk Transmisi Tenaga Listrik (kms)

ISU STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN	WILAYAH	STRATEGI PENGEMBANGAN	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS
				<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kapasitas pembangkit listrik melalui Gardu Distribusi kVA • Peningkatan kapasitas pembangkit listrik melalui JTM • Peningkatan kapasitas pembangkit listrik melalui JTR • Peningkatan kapasitas PLTP terpasang • pelaksanaan Survei Umum di Wilayah Terbuka • Pengembangan Energi Alternatif <ul style="list-style-type: none"> (i) Listrik Desa (EBT) (ii) PLTS Tersebar (iii) PLTS Terpusat (iv) PLTMH (kW) (v) PLT Angin (kW) (vi) Pembangunan unit pengolahan Biofuel (vii) Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman tahunan (Penyediaan Bahan bakar Bio Energi) <p>Prioritas Pulau</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengendalian pengembangan kota Sofifi sebagai pusat pelayanan primer yang sesuai dengan daya dukung lingkungannya • Pengembangan kerjasama antardaerah
<p>Pembangunan wilayah perbatasan, tertinggal dan pulau terpencil dan kawasan bencana</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kejelasan perbatasan 	<ul style="list-style-type: none"> • Penguatan kedaulatan wilayah nasional melalui pendekatan kesejahteraan dan keamanan 	<ul style="list-style-type: none"> • Maluku • Maluku Utara 	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan stabilitas keamanan kawasan perbatasan 	<p>Prioritas Nasional</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan kebijakan khusus dalam bidang infrastruktur dan pendukung kesejahteraan lainnya yang dapat mendorong pertumbuhan di daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan pasca-konflik • Pembentukan kerjasama dengan negara-negara tetangga dalam rangka pengamanan

ISU STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN	WILAYAH	STRATEGI PENGEMBANGAN	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS
antarnegara <ul style="list-style-type: none"> • Rendahnya jumlah dan menurunnya persentase kredit usaha kecil di Provinsi Maluku dan Maluku Utara • Kurangnya akses penduduk terhadap sarana dan prasarana di Provinsi Maluku dan Maluku Utara 			<ul style="list-style-type: none"> • Mengembangkan kegiatan ekonomi di wilayah perbatasan, tertinggal dan pulau terpencil 	wilayah dan sumber daya kelautan <ul style="list-style-type: none"> • Penyelesaian pemetaan wilayah perbatasan RI dengan Malaysia, Papua Nugini, Timor Leste, dan Filipina pada 2010 Prioritas Pulau <ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan sarana dan prasarana pertahanan dan keamanan Prioritas Nasional <ul style="list-style-type: none"> • Integrasi Program Perlindungan Sosial berbasis keluarga (PKH, bantuan pangan, jamkesmas, beasiswa anak keluarga berpendapatan rendah, PAUD) • Penambahan anggaran PNPB Mandiri dari Rp. 10,3 T pada tahun 2009 menjadi Rp. 12,1 T pada tahun 2010*) • Penataan regulasi untuk menjamin kepastian hukum atas lahan pertanian • Pembangunan dan pemeliharaan jaringan listrik yang melayani daerah-daerah sentra produksi pertanian demi peningkatan kuantitas dan kualitas produksi • Pembangunan dan pemeliharaan teknologi komunikasi dan sistem informasi nasional yang melayani daerah-daerah sentra produksi pertanian demi peningkatan kuantitas dan kualitas produksi serta kemampuan pemasarannya • Dorongan untuk investasi pangan, pertanian, dan industri perdesaan berbasis produk lokal oleh pelaku usaha dan pemerintah • Penyediaan pembiayaan yang terjangkau • Sistem subsidi yang menjamin ketersediaan benih varietas unggul yang teruji, pupuk, teknologi dan sarana pasca panen yang sesuai secara tepat waktu, tepat jumlah, dan terjangkau

ISU STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN	WILAYAH	STRATEGI PENGEMBANGAN	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS
				<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan jaringan prasarana dan penyediaan sarana transportasi antar moda dan antar pulau yang terintegrasi sesuai dengan sistem transportasi nasional dan cetak biru transportasi multimoda • Penurunan tingkat kecelakaan transportasi • Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya • Penyediaan Jasa Telekomunikasi • Peningkatan Deregulasi Kebijakan • Pengembangan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) • Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Penanaman Modal • Administrasi Badan Hukum • Revitalisasi Pasar Tradisional • Koordinasi Penataan dan Pengembangan Sistem Logistik Nasional • Pengembangan dan penetapan sistem logistik nasional yang menjamin kelancaran arus barang dan mengurangi biaya transaksi/ekonomi biaya tinggi • Pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan di bidang lalu lintas dan angkutan laut (Pembangunan kapal perintis dan subsidi operasi perintis) • Pengelolaan dan pembangunan kegiatan di bidang pelabuhan dan pengerukan • Koordinasi pengembangan dan penerapan sistem National Single Window/NSW dan ASEAN Single Window/ASW • Koordinasi pengembangan urusan penataan ruang dan pengembangan wilayah • Penetapan kebijakan energi yang memastikan penanganan energi nasional yang

ISU STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN	WILAYAH	STRATEGI PENGEMBANGAN	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS
				<p>terintegrasi sesuai dengan Rencana Induk Energi Nasional</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kapasitas pembangkit listrik melalui Pembangkit PLTD (Unit/kW) • Peningkatan kapasitas pembangkit listrik melalui Jaringan Transmisi Tenaga Listrik (kms) • Peningkatan kapasitas pembangkit listrik melalui Gardu Induk Transmisi Tenaga Listrik (kms) • Peningkatan kapasitas pembangkit listrik melalui Gardu Distribusi kVA • Peningkatan kapasitas pembangkit listrik melalui JTM • Peningkatan kapasitas pembangkit listrik melalui JTR • Peningkatan kapasitas PLTP terpasang • pelaksanaan Survei Umum di Wilayah Terbuka • Pengembangan Energi Alternatif <ul style="list-style-type: none"> (i) Listrik Desa (EBT) (ii) PLTS 50 Wp Tersebar (iii) PLTS Terpusat 15 kW (iv) PLTMH (kW) (v) PLT Angin (kW) (vi) Pembangunan unit pengolahan Biofuel (vii) Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman tahunan (Penyediaan Bahan bakar Bio Energi) • Pelaksanaan kebijakan khusus dalam bidang infrastruktur dan pendukung kesejahteraan lainnya yang dapat mendorong pertumbuhan di daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan pasca-konflik

ISU STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN	WILAYAH	STRATEGI PENGEMBANGAN	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS
				<ul style="list-style-type: none"> • Pengentasan daerah tertinggal Prioritas Pulau • Pengembangan kota Ilwaki, Saumlaki, Daruba, dan Dobo sebagai pusat pelayanan sekunder • Penguatan perdagangan domestik wilayah • Peningkatan keterkaitan daerah/wilayah tertinggal dan terpencil dengan pusat-pusat pertumbuhan wilayah (Ambon, Ternate dan Sofifi) • Pembangunan jalan di pulau-pulau terpencil dan pulau terluar • Pengembangan jalur pelayaran perintis • Introduksi teknologi tepat guna
<p>Rendahnya kinerja birokrasi dan tata kelola</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rendahnya kapasitas Pemda dalam menjalankan tata pemerintahan yang baik 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan reformasi birokrasi dan tata kelola 	<ul style="list-style-type: none"> • Maluku • Maluku Utara 	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan kualitas regulasi dan peraturan daerah 	<p>Prioritas Nasional</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penataan Daerah Otonom dan Otonomi Khusus • Pembinaan administrasi pejabat negara di daerah dan DPRD • Pendidikan dan pelatihan Bidang Pemerintahan dan Politik • Penataan Urusan Pemerintahan Daerah dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah • Penataan Produk Hukum dan Pelayanan Bantuan Hukum Departemen • Pengembangan Kapasitas dan Evaluasi Kinerja Daerah • Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerjasama Daerah • Kepastian Hukum: Pembenahan Peraturan Perundang-undangan • Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan • Penataan Produk Hukum dan Pelayanan Bantuan Hukum Departemen

ISU STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN	WILAYAH	STRATEGI PENGEMBANGAN	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS
			<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan penegakan hukum dan HAM termasuk penanganan kasus korupsi 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan Deregulasi Kebijakan • Perumusan Kebijakan di Bidang PPN, PBB, BPHTB, KUP, PPSP, dan Bea Materai • Perumusan Kebijakan di Bidang PPh dan Perjanjian Kerjasama Perpajakan Internasional • Menyempurnaan peraturan ketenagakerjaan dan sinkronisasi kebijakan ketenagakerjaan (pusat) dengan kebijakan/ peraturan daerah <p>Prioritas Pulau</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan Kinerja Kelembagaan Demokrasi • Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik <p>Prioritas Nasional</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembinaan Administrasi Anggaran Daerah • Pembinaan dan Fasilitasi Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah • Pembinaan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian • Peningkatan integrasi dan integritas penerapan dan penegakan hukum oleh seluruh lembaga dan aparat hukum • Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan • Penguatan lembaga hubungan industrial: (a) mendorong pembentukan lembaga bipartite; (b) Penguatan perundingan antara perwakilan pekerja dan pengusaha dengan meningkatkan teknik-teknik bernegosiasi; (c) Peningkatan kualitas penyelesaian perselisihan <p>Prioritas Pulau</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penataan Kelembagaan, Ketatalaksanaan, Serta Sistem Pengawasan dan Akuntabilitas <p>Prioritas Nasional</p>
			<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan kualitas 	<p>Prioritas Nasional</p>

ISU STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN	WILAYAH	STRATEGI PENGEMBANGAN	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS
			pelayanan publik	<ul style="list-style-type: none"> • Penataan Daerah Otonom dan Otonomi Khusus • Pembinaan dan Fasilitasi Dana Perimbangan • Pembinaan Administrasi Anggaran Daerah • Pembinaan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian • Pendidikan dan pelatihan Bidang Pemerintahan dan Politik • Pengembangan Kapasitas dan Evaluasi Kinerja Daerah • Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerjasama Daerah • Penetapan dan penerapan sistem indikator kinerja utama pelayanan publik yang selaras antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah • Pengelolaan Informasi Manajemen Kependudukan • Peningkatan Deregulasi Kebijakan • Koordinasi pengembangan dan penerapan sistem National Single Window/NSW dan ASEAN Single Window/ASW • Perumusan Kebijakan di Bidang PPN, PBB, BPHTB, KUP, PPSP, dan Bea Materai • Perumusan Kebijakan di Bidang PPh dan Perjanjian Kerjasama Perpajakan Internasional • Penetapan kebijakan energi yang memastikan penanganan energi nasional yang terintegrasi sesuai dengan Rencana Induk Energi Nasional
Kualitas sumberdaya manusia <ul style="list-style-type: none"> • Rendahnya IPM Maluku dan Maluku Utara dibanding rata-rata nasional • Rendahnya akses terhadap 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kualitas sumber daya manusia untuk mendukung ketersediaan angkatan kerja berkecakupan 	<ul style="list-style-type: none"> • Maluku • Maluku Utara 	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan akses pelayanan pendidikan dan ketrampilan kerja 	Prioritas Nasional <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan APM Pendidikan Dasar, Menengah dan SMA • Pemantapan/ rasionalisasi implementasi BOS • Penurunan harga buku standar di tingkat sekolah dasar dan menengah • Penyediaan sambungan internet ber-content pendidikan ke sekolah tingkat menengah

ISU STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN	WILAYAH	STRATEGI PENGEMBANGAN	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS
<p>pendidikan dasar dan menengah di Maluku dan Maluku Utara</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rendahnya status kesehatan dan gizi masyarakat di Maluku dan Maluku Utara 	<p>dan berpendidikan tinggi</p>			<p>selambat-lambatnya 2012 dan terus diperluas ke tingkat sekolah dasar</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan APK Pendidikan Tinggi • Penyesuaian sistem Ujian Akhir Nasional pada 2011 • Penyempurnaan kurikulum sekolah dasar-menengah sebelum tahun 2011 yang diterapkan di 25% sekolah pada 2012 dan 100% pada 2014 • Pemberdayaan peran Kepala Sekolah sebagai manajer sistem pendidikan yang unggul • Revitalisasi peran Pengawas Sekolah sebagai entitas quality assurance • Mendorong aktivasi peran Komite Sekolah untuk menjamin keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses pembelajaran • Mendorong aktivasi peran Dewan Pendidikan di tingkat kabupaten • Penataan ulang kurikulum sekolah yang dibagi menjadi kurikulum tingkat nasional, daerah, dan sekolah dengan memasukkan pendidikan kewirausahaan • Program remediasi kemampuan mengajar guru • Penerapan sistem evaluasi kinerja profesional tenaga pengajar • Sertifikasi ISO 9001:2008 • Peningkatan kerjasama PTN dengan lembaga pendidikan internasional • Mendorong 11 PT masuk Top 500 THES pada 2014 • Peningkatan perbandingan guru:murid • Memastikan tercapainya Standar Nasional Pendidikan (SNP) bagi Pendidikan Agama dan Keagamaan paling lambat tahun 2013 • Layanan Jasa Perpustakaan dan Informasi • Pengembangan Perpustakaan dan Pengkajian Minat Baca

ISU STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN	WILAYAH	STRATEGI PENGEMBANGAN	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS
			<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan akses pelayanan kesehatan 	<p>Prioritas Pulau</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan pendidikan vokasional • Penyelenggaraan Pendidikan Keaksaraan Fungsional <p>Prioritas Nasional</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak • Pemberian imunisasi dasar kepada balita • Penyediaan akses sumber air bersih • Peningkatan akses sanitasi dasar berkualitas • Pemberlakuan Daftar Obat Esensial Nasional (DOEN) sebagai dasar pengadaan obat di seluruh Indonesia dan pembatasan harga obat generik bermerek pada tahun 2010 • Perluasan Asuransi Kesehatan Nasional melalui : i) Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin di Puskesmas; ii) Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin di Rumah Sakit; iii) Dukungan Manajemen Pengelolaan, Pembinaan, dan Pengembangan Jaminan Kesehatan • Peningkatan kualitas dan jangkauan layanan KB melalui klinik pemerintah dan swasta melalui: i) Pembinaan kesertaan ber KB; ii) Penguatan Sumberdaya Penyelenggara program KB; iii) Peningkatan advokasi pada stakeholder; iv) Peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi pengendalian penduduk dan KB; v) Pengembangan Media Komunikasi; vi) Peningkatan kemitraan dengan lintas sektor dan pemda; viii) Peningkatan kemitraan dengan sektor swasta, LSM, dan masyarakat; viii) Penyediaan data dan informasi program kependudukan dan KB • Penurunan prevalensi Tuberculosis • Penurunan kasus malaria (Annual Parasite Index-API)

ISU STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN	WILAYAH	STRATEGI PENGEMBANGAN	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS
			<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan produktivitas angkatan kerja dan mengembangkan ekonomi lokal 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengendalian prevalensi HIV pada populasi dewasa • Penurunan prevalensi kekurangan gizi (terdiri dari gizi-kurang dan gizi-buruk) pada anak balita Prioritas Pulau • Pemberian insentif bagi tenaga medis yang ditempatkan di daerah-daerah tertinggal, terpencil, dan pulau-pulau terdepan • Peningkatan edukasi masyarakat tentang pola hidup sehat • Peningkatan kualitas lingkungan permukiman Prioritas Nasional • Integrasi Program Perlindungan Sosial berbasis keluarga (PKH, bantuan pangan, jamkesmas, beasiswa anak keluarga berpendapatan rendah, PAUD) • Penambahan anggaran PNPB Mandiri dari Rp. 10,3 T pada tahun 2009 menjadi Rp. 12,1 T pada tahun 2010*) • Penataan regulasi untuk menjamin kepastian hukum atas lahan pertanian • Pengembangan areal pertanian baru • Penertiban, serta optimalisasi penggunaan lahan terlantar • Pembangunan dan pemeliharaan sarana transportasi dan angkutan yang melayani daerah-daerah sentra produksi pertanian demi peningkatan kuantitas dan kualitas produksi serta kemampuan pemasarannya • Pembangunan dan pemeliharaan pengairan yang melayani daerah-daerah sentra produksi pertanian demi peningkatan kuantitas dan kualitas produksi • Pembangunan dan pemeliharaan jaringan listrik yang melayani daerah-daerah sentra

ISU STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN	WILAYAH	STRATEGI PENGEMBANGAN	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS
				<p>produksi pertanian demi peningkatan kuantitas dan kualitas produksi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan dan pemeliharaan teknologi komunikasi dan sistem informasi nasional yang melayani daerah-daerah sentra produksi pertanian demi peningkatan kuantitas dan kualitas produksi serta kemampuan pemasarannya • Dorongan untuk investasi pangan, pertanian, dan industri perdesaan berbasis produk lokal oleh pelaku usaha dan pemerintah • Penyediaan pembiayaan yang terjangkau • Sistem subsidi yang menjamin ketersediaan benih varietas unggul yang teruji, pupuk, teknologi dan sarana pasca panen yang sesuai secara tepat waktu, tepat jumlah, dan terjangkau • Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya • Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku • Penyediaan Jasa Telekomunikasi • Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan • Peningkatan Deregulasi Kebijakan • Kepastian Hukum: Pembetulan Peraturan Perundang-undangan: Penanganan dan Pencegahan sengketa, konflik dan perkara pertanahan • Pengembangan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) • Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Penanaman Modal • Administrasi Badan Hukum • Revitalisasi Pasar Tradisional

ISU STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN	WILAYAH	STRATEGI PENGEMBANGAN	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS
				<ul style="list-style-type: none"> • Koordinasi Penataan dan Pengembangan Sistem Logistik Nasional • Pengembangan dan penetapan sistem logistik nasional yang menjamin kelancaran arus barang dan mengurangi biaya transaksi/ekonomi biaya tinggi • Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Jalan Nasional • Koordinasi pengembangan urusan penataan ruang dan pengembangan wilayah • Penetapan kebijakan energi yang memastikan penanganan energi nasional yang terintegrasi sesuai dengan Rencana Induk Energi Nasional • Peningkatan kapasitas pembangkit listrik melalui Pembangkit PLTD (Unit/kW) • Peningkatan kapasitas pembangkit listrik melalui Jaringan Transmisi Tenaga Listrik (kms) • Peningkatan kapasitas pembangkit listrik melalui Gardu Induk Transmisi Tenaga Listrik (kms) • Peningkatan kapasitas pembangkit listrik melalui Gardu Distribusi kVA • Peningkatan kapasitas pembangkit listrik melalui JTM • Peningkatan kapasitas pembangkit listrik melalui JTR • Peningkatan kapasitas PLTP terpasang • pelaksanaan Survei Umum di Wilayah Terbuka • Pengembangan Energi Alternatif <ul style="list-style-type: none"> (i) Listrik Desa (EBT) (ii) PLTS Tersebar (iii) PLTS Terpusat (iv) PLTMH (kW)

ISU STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN	WILAYAH	STRATEGI PENGEMBANGAN	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS
				(v) PLT Angin (kW) (vi) Pembangunan unit pengolahan Biofuel (vii) Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman tahunan (Penyediaan Bahan bakar Bio Energi) Prioritas Pulau <ul style="list-style-type: none"> • Introduksi teknologi tepat guna • Pengembangan balai latihan kerja • Peningkatan pendampingan dan fasilitasi dalam pengembangan ekonomi lokal
Tingginya dampak konflik Maluku terhadap keamanan lingkungan, kehidupan sosial dan ekonomi, serta lingkungan <ul style="list-style-type: none"> • Masih adanya potensi konflik antar golongan dan antar umat beragama • Tingginya persentase pengangguran, kemiskinan, dan modal sosial sebagai konsekuensi dari konflik sosial di Provinsi Maluku 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan harmoni kehidupan masyarakat dengan kemajemukan agama dan golongan 	<ul style="list-style-type: none"> • Maluku 	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan kapasitas lembaga keswadayaan masyarakat • Memulihkan modal sosial dan rasa saling percaya di tengah masyarakat 	Prioritas Nasional <ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan kebijakan khusus dalam bidang infrastruktur dan pendukung kesejahteraan lainnya yang dapat mendorong pertumbuhan di daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan pasca-konflik Prioritas Pulau <ul style="list-style-type: none"> • Pemberdayaan lembaga keswadayaan masyarakat • Penguatan lembaga adat dan nilai-nilai luhur adat Prioritas Nasional <ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan kebijakan khusus dalam bidang infrastruktur dan pendukung kesejahteraan lainnya yang dapat mendorong pertumbuhan di daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan pasca-konflik • Penelitian dan Pengembangan Bidang Kebudayaan (Bd) • Pelestarian dan Pengembangan Kesenian Prioritas Pulau <ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan Budaya Harmonis

ISU STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN	WILAYAH	STRATEGI PENGEMBANGAN	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS
				<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kerjasama dan dialog antar lembaga keswadayaan masyarakat, antara pemerintah dan lembaga keswadayaan masyarakat, dan antar umat beragama • Peningkatan partisipasi seluruh unsur masyarakat dalam perencanaan dan perumusan kebijakan
	<ul style="list-style-type: none"> • Percepatan pemulihan kondisi sosial ekonomi masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> • Maluku 	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan pertumbuhan sektor-sektor yang menyerap banyak tenaga kerja 	<p>Prioritas Nasional</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penataan regulasi untuk menjamin kepastian hukum atas lahan pertanian • Pengembangan areal pertanian baru • Penertiban, serta optimalisasi penggunaan lahan terlantar • Pembangunan dan pemeliharaan pengairan yang melayani daerah-daerah sentra produksi pertanian demi peningkatan kuantitas dan kualitas produksi • Pembangunan dan pemeliharaan jaringan listrik yang melayani daerah-daerah sentra produksi pertanian demi peningkatan kuantitas dan kualitas produksi • Dorongan untuk investasi pangan, pertanian, dan industri perdesaan berbasis produk lokal oleh pelaku usaha dan pemerintah Penyediaan pembiayaan yang terjangkau • Pelaksanaan kebijakan khusus dalam bidang infrastruktur dan pendukung kesejahteraan lainnya yang dapat mendorong pertumbuhan di daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan pasca-konflik <p>Prioritas Pulau</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pemberian insentif bagi sektor-sektor penyerap angkatan kerja
Ketergantungan pasokan pangan dari luar wilayah sebagai konsekuensi	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan ketahanan pangan di tingkat wilayah 	<ul style="list-style-type: none"> • Maluku • Maluku Utara 	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman pangan 	<p>Prioritas Nasional</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penataan regulasi untuk menjamin kepastian hukum atas lahan pertanian • Pengembangan areal pertanian baru

ISU STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN	WILAYAH	STRATEGI PENGEMBANGAN	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS
<p>menurunnya luas areal dan produksi tanaman pangan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rendahnya luas panen dan produksi tanaman pangan di Provinsi Maluku dan Maluku Utara 				<ul style="list-style-type: none"> • Penertiban, serta optimalisasi penggunaan lahan terlantar • Pembangunan dan pemeliharaan sarana transportasi dan angkutan yang melayani daerah-daerah sentra produksi pertanian demi peningkatan kuantitas dan kualitas produksi serta kemampuan pemasarannya • Pembangunan dan pemeliharaan pengairan yang melayani daerah-daerah sentra produksi pertanian demi peningkatan kuantitas dan kualitas produksi • Peningkatan upaya penelitian dan pengembangan bidang pertanian yang mampu menciptakan benih unggul dan hasil penelitian lainnya menuju kualitas dan produktivitas hasil pertanian nasional yang tinggi • Dorongan untuk investasi pangan, pertanian, dan industri perdesaan berbasis produk lokal oleh pelaku usaha dan pemerintah • Penyediaan pembiayaan yang terjangkau • Sistem subsidi yang menjamin ketersediaan benih varietas unggul yang teruji, pupuk, teknologi dan sarana pasca panen yang sesuai secara tepat waktu, tepat jumlah, dan terjangkau • Pengambilan langkah-langkah konkrit terkait adaptasi dan antisipasi sistem pangan dan pertanian terhadap perubahan iklim • Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya • Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku • Peningkatan Deregulasi Kebijakan • Pengembangan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) • Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Penanaman Modal

ISU STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN	WILAYAH	STRATEGI PENGEMBANGAN	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS
				<ul style="list-style-type: none"> • Administrasi Badan Hukum • Revitalisasi Pasar Tradisional • Pengembangan dan penetapan sistem logistik nasional yang menjamin kelancaran arus barang dan mengurangi biaya transaksi/ekonomi biaya tinggi • Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Jalan Nasional • Koordinasi pengembangan urusan penataan ruang dan pengembangan wilayah <p>Prioritas Pulau</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penerapan teknologi tepat guna • Pengendalian konversi lahan pertanian terutama yang beririgasi teknis • Perbaikan distribusi input produksi pertanian (bibit unggul, pupuk, pestisida, alat-alat pertanian)
			<ul style="list-style-type: none"> • Memperkuat interaksi perdagangan antarwilayah 	<p>Prioritas Nasional</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan dan pemeliharaan teknologi komunikasi dan sistem informasi nasional yang melayani daerah-daerah sentra produksi pertanian demi peningkatan kuantitas dan kualitas produksi serta kemampuan pemasarannya • Pembangunan jaringan prasarana dan penyediaan sarana transportasi antar moda dan antar pulau yang terintegrasi sesuai dengan sistem transportasi nasional dan cetak biru transportasi multimoda • Penuntasan pembangunan jaringan serat optik di Indonesia Bagian Timur sebelum 2013 • Penyediaan Jasa Telekomunikasi • Peningkatan Deregulasi Kebijakan Peningkatan Kelancaran Distribusi Bahan Pokok

ISU STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN	WILAYAH	STRATEGI PENGEMBANGAN	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS
				<ul style="list-style-type: none"> • Revitalisasi Pasar Tradisional • Koordinasi Penataan dan Pengembangan Sistem Logistik Nasional • Perumusan Kebijakan dan Bimbingan Teknis Fasilitas Bidang Kepabeanan (Prioritas Nasional) • Pengembangan dan penetapan sistem logistik nasional yang menjamin kelancaran arus barang dan mengurangi biaya transaksi/ekonomi biaya tinggi • Pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan di bidang lalu lintas dan angkutan laut (Pembangunan kapal perintis dan subsidi operasi perintis) • Pengelolaan dan pembangunan kegiatan di bidang pelabuhan dan pengerukan • Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Jalan Nasional • Perumusan Kebijakan dan Pengembangan Teknologi Informasi Kepabeanan dan Cukai • Pengembangan sertifikasi sistem elektronik jasa aplikasi dan konten untuk mendukung transaksi elektronik • Koordinasi pengembangan dan penerapan sistem National Single Window/NSW dan ASEAN Single Window/ASW
			<ul style="list-style-type: none"> • Diversifikasi pangan 	<p>Prioritas Nasional</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan dan pemeliharaan pengairan yang melayani daerah-daerah sentra produksi pertanian demi peningkatan kuantitas dan kualitas produksi • Dorongan untuk investasi pangan, pertanian, dan industri perdesaan berbasis produk lokal oleh pelaku usaha dan pemerintah

ISU STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN	WILAYAH	STRATEGI PENGEMBANGAN	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS
				<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kualitas gizi dan keanekaragaman pangan melalui pola pangan harapan • Pengambilan langkah-langkah konkrit terkait adaptasi dan antisipasi sistem pangan dan pertanian terhadap perubahan iklim (5) <p>Prioritas Pulau</p> <ul style="list-style-type: none"> • Revitalisasi bahan pangan sagu • Pengembangan penelitian inovatif bahan pangan alternatif
<p>Konservasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup serta Mitigasi Bencana</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kerentanan wilayah kepulauan terhadap dampak perubahan iklim • Kerentanan wilayah kepulauan Maluku terhadap bencana gempa dan tsunami 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara berkelanjutan • Peningkatan kewaspadaan dini terhadap potensi bencana alam 	<ul style="list-style-type: none"> • Maluku • Maluku Utara 	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan konservasi sumber daya alam dan lingkungan hidup • Mitigasi bencana alam 	<p>Prioritas Nasional</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penurunan beban pencemaran lingkungan melalui pengawasan ketaatan pengendalian pencemaran air limbah dan emisi • Penjaminan berjalannya fungsi Sistem Peringatan Dini Cuaca (MEWS) mulai 2010 dan seterusnya • Koordinasi pengembangan urusan penataan ruang dan pengembangan wilayah <p>Prioritas Nasional</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penjaminan berjalannya fungsi Sistem Peringatan Dini Tsunami (TEWS), mulai 2010 dan seterusnya • Penjaminan berjalannya fungsi Sistem Peringatan Dini Cuaca (MEWS) mulai 2010 dan seterusnya • Peningkatan kapasitas aparat pemerintah dan masyarakat dalam usaha pengurangan risiko, mitigasi dan penanganan bencana dan bahaya kebakaran hutan • Penyiapan peralatan dan logistik di kawasan rawan bencana • Koordinasi pengembangan urusan penataan ruang dan pengembangan wilayah



BAB VIII

PENGEMBANGAN WILAYAH PAPUA TAHUN 2010—2014

8.1 Kondisi Wilayah Papua Saat Ini

8.1.1 Capaian Pembangunan Wilayah

Pertumbuhan ekonomi wilayah Papua cukup berfluktuasi. Perekonomian wilayah Papua yang bertumpu pada sektor pertambangan dan penggalian menyebabkan fluktuasi pada sektor tersebut langsung berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Pada tahun 2004, pertumbuhan ekonomi Provinsi Papua sebesar -22,5 persen dan pada tahun 2008 tumbuh sebesar -1,5 persen. Sementara itu, Pertumbuhan ekonomi Provinsi Papua Barat tumbuh sebesar 7,4 persen di tahun 2004 dan tumbuh sebesar 8,6 persen pada tahun 2008. Gambaran mengenai pertumbuhan ekonomi wilayah Papua dapat dilihat pada Tabel 8.1 berikut ini.

TABEL 8.1
PERTUMBUHAN EKONOMI WILAYAH PAPUA TAHUN 2004—2008
ATAS DASAR HARGA KONSTAN TAHUN 2000 (DALAM PERSEN)

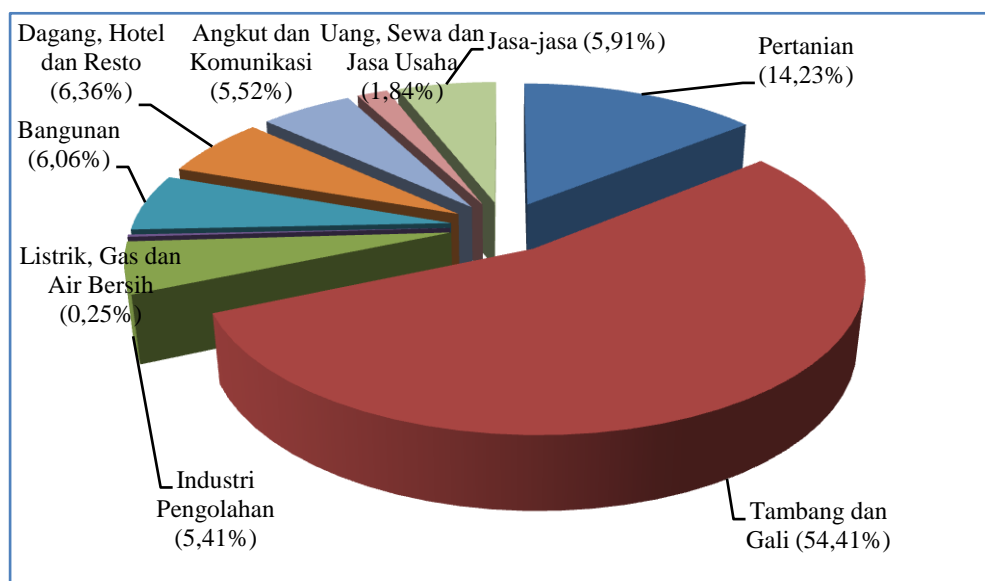
Tahun	Papua Barat	Papua
2004	7,4	-22,5
2005	6,8	36,4
2006	4,6	-17,1
2007	6,9	4,3
2008	8,6	-1,5

Sumber : Badan Pusat Statistik

Berdasarkan data triwulan 1 tahun 2008, sektor pertambangan dan penggalian memberikan kontribusi paling besar terhadap perekonomian di wilayah Papua. Sementara itu, sektor pertanian, terutama kehutanan, juga menjadi kontributor utama bagi perekonomian wilayah Papua. Kontribusi sektor sekunder dan tersier masih relatif lebih rendah, yaitu di bawah 10 persen. Kedua provinsi di atas mempunyai kendala yang

sama, yaitu ketersediaan listrik dan air bersih seperti terlihat dari kontribusi sektor tersebut pada perekonomian yang cukup kecil, yaitu hanya sebesar 0,25 persen. Secara lengkap, kontribusi tiap sektor bagi perekonomian wilayah Papua dapat dilihat pada Gambar 8.1 sebagai berikut.

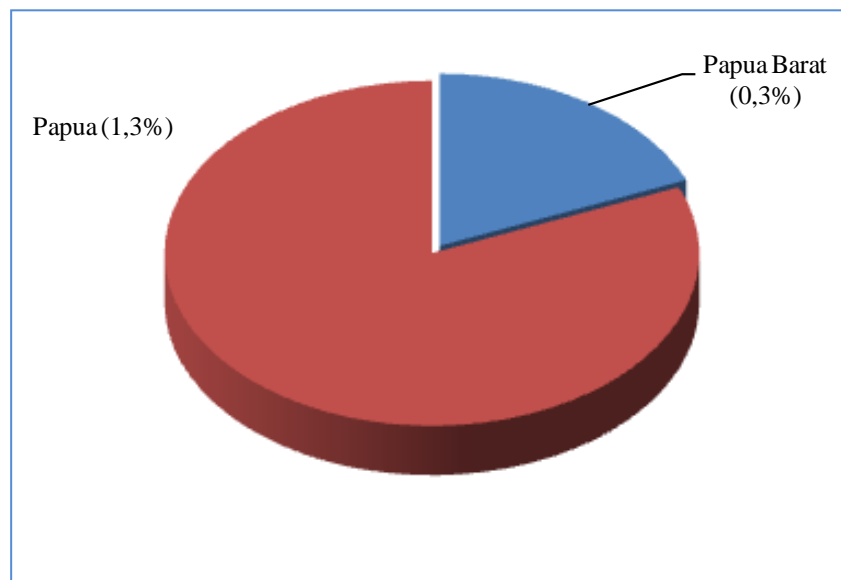
GAMBAR 8.1
KONTRIBUSI EKONOMI WILAYAH PAPUA MENURUT SEKTOR
ATAS DASAR HARGA BERLAKU TRIWULAN I TAHUN 2008



Sumber : Badan Pusat Statistik (diolah)

Secara keseluruhan, kontribusi perekonomian wilayah Papua terhadap perekonomian nasional pada tahun 2008 adalah 1,6 persen. Sementara itu, kontribusi perekonomian provinsi di wilayah Papua terhadap perekonomian wilayah nasional sebagian besar berasal dari perekonomian di Provinsi Papua sebesar 1,3 persen terhadap perekonomian nasional atau lebih dari 80 persen total perekonomian wilayah Papua dan Papua Barat, yaitu 0,3 persen terhadap perekonomian nasional atau hanya kurang dari 20 persen terhadap total perekonomian wilayah Papua. Kontribusi ekonomi wilayah Papua terhadap perekonomian nasional dapat dilihat pada Gambar 8.2 berikut ini.

GAMBAR 8.2
KONTRIBUSI EKONOMI WILAYAH PAPUA TERHADAP EKONOMI NASIONAL ATAS
DASAR HARGA BERLAKU TAHUN 2008



Sumber : Badan Pusat Statistik (diolah)

Di Provinsi Papua terdapat potensi pengolahan kakao dengan luas penanaman yang terus bertambah di beberapa kabupaten. Permasalahan yang dihadapi adalah terbatasnya tenaga penyuluh lapangan, baik dari segi jumlah maupun mutu, untuk melakukan tugas-tugas pendampingan, terbatasnya sarana produksi terutama pestisida, terbatasnya sumber dana pengembangan kakao, rendahnya nilai tambah, dan rendahnya proses pengolahan. Di Provinsi Papua juga terdapat potensi pengolahan kopi. Permasalahan yang dihadapi hampir sama dengan pengolahan kakao, yaitu terbatasnya tenaga penyuluh lapangan, baik dalam aspek jumlah maupun mutu, untuk melakukan tugas-tugas pendampingan, rendahnya nilai tambah produksi biji kopi kering, terbatasnya sarana produksi, rendahnya proses pengolahan dan pengeringan biji kopi dan belum tertatanya kelembagaan di tingkat petani plasma.

Di Provinsi Papua Barat terdapat potensi pengolahan hasil laut yang berpeluang untuk dikembangkan. Hasil ikan laut utama mencakup udang, kepiting, rajungan, cumi-cumi, sotong yang dipasarkan dalam bentuk segar atau dikeringkan melalui proses penggaraman, pengasapan, pembekuan, pengalengan, dan proses lain. Permasalahan yang dihadapi adalah rendahnya kualitas ikan sebagai akibat kurangnya infrastruktur, rendahnya produktivitas sebagai akibat rendahnya teknologi pengolahan yang digunakan, terbatasnya pemasaran hasil pengolahan, kurangnya diversifikasi produk-produk hasil laut, kurang kondusifnya iklim usaha, rendahnya investasi pengolahan

hasil laut, kurangnya sumber daya manusia dalam penangkapan dan pengolahan hasil laut, masih sederhananya sarana dan prasarana pendukung penangkapan dan pengolahan, serta belum adanya kemitraan antara masyarakat petani nelayan dan industri pengolahan.

Dalam aspek perdagangan, wilayah Maluku dan wilayah Jawa dan Bali merupakan dua mitra dagang penting wilayah Papua. Ikatan perdagangan dengan wilayah Maluku terkait dengan kedekatan kondisi geografis wilayah tersebut. Dalam kerangka pengembangan potensi kerja sama, ada empat wilayah lain perlu diidentifikasi sebagai daerah berpotensi untuk perluasan kerja sama perdagangan terutama yang memungkinkan penghematan biaya dan oportunitas dalam pergerakan barang dan jasa.

Persetujuan investasi PMDN pada tahun 2008 adalah 1.45 persen dari total persetujuan PMDN secara nasional. Sementara itu, investasi PMA pada tahun 2008 adalah 0.13 persen pada tahun 2008 terhadap total investasi PMA secara nasional. Investasi asing yang paling dominan di Provinsi Papua adalah pada bidang pertambangan dan kehutanan kemudian diikuti industri perkebunan (tebu), perikanan, dan peternakan. PMDN banyak dilakukan oleh perusahaan yang berbasis sumber daya alam, pertanian dan perkebunan, dan investasi dominan adalah perkebunan kelapa sawit terpadu, perikanan, dan kehutanan diikuti oleh sektor peternakan budi daya sapi potong.

Dalam kurun lima tahun terakhir, PDRB per kapita wilayah Papua terus meningkat. Pendapatan per kapita di Provinsi Papua relatif lebih tinggi jika dibandingkan dengan Papua Barat (**Tabel 8.2**).

TABEL 8.2
PDRB PER KAPITA DENGAN MIGAS WILAYAH PAPUA TAHUN 2004-2008
ATAS DASAR HARGA KONSTAN TAHUN 2000 (DALAM RIBU RUPIAH)

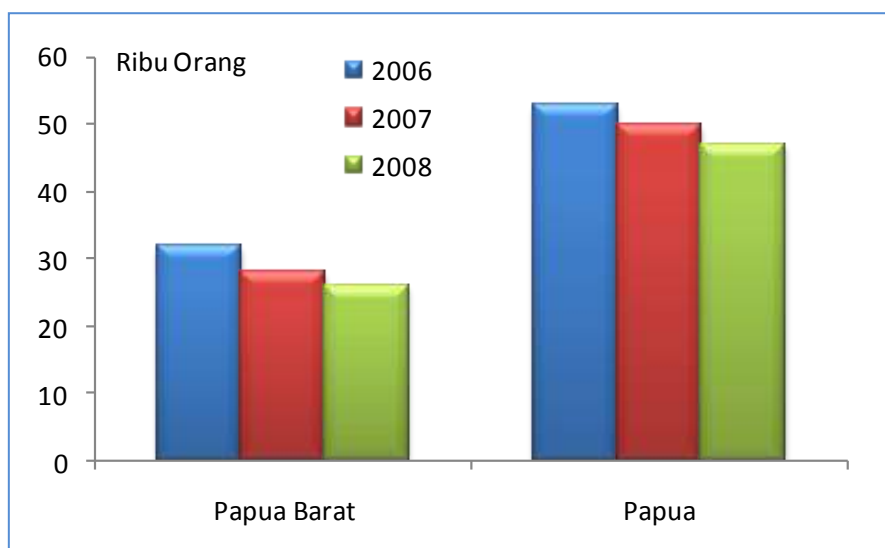
Tahun	Papua Barat	Papua
2004	7,735	8,690
2005	7,712	11,479
2006	7,903	9,318
2007	8,288	9,526
2008	8,725	9,198

Sumber : Badan Pusat Statistik

Jumlah penduduk wilayah Papua hanya berjumlah sekitar 2,8 juta jiwa atau 1,2 persen dari total penduduk nasional. Wilayah Papua memiliki tingkat kepadatan penduduk paling rendah, di antara wilayah lain di Indonesia, yaitu hanya sebesar 7 jiwa per km². Angka rata-rata anggota rumah tangga yang kecil menunjukkan kesiapan untuk melakukan modernisasi kehidupan. Konsentrasi penduduk tersebar di perdesaan dan pedalaman tetapi proporsi penduduk di perkotaan terus meningkat dari tahun ke tahun. Pergeseran kepadatan penduduk dari desa ke kota tersebut mengindikasikan tingginya tingkat urbanisasi di Papua. Dalam perkembangannya, jumlah penduduk lokal di wilayah Papua relatif besar, tetapi proporsi penduduk pendatang terus meningkat.

Jumlah penganggur di Provinsi Papua relatif lebih tinggi jika dibandingkan dengan pengangguran di Provinsi Papua Barat. Jumlah penganggur di Provinsi Papua cenderung menurun dalam periode 2006—2008. Jumlah pengangguran terbuka di Provinsi Papua Barat adalah sebesar 26 ribu orang, sedangkan pengangguran di Provinsi Papua sebesar 47 ribu orang.

GAMBAR 8.3
JUMLAH PENGANGGURAN WILAYAH PAPUA TAHUN 2006—2008



Sumber : Badan Pusat Statistik (diolah)

Tingginya persentase kemiskinan dan masih sulitnya akses terhadap pelayanan kesehatan dan pendidikan merupakan permasalahan utama yang terjadi di sebagian besar wilayah Papua. Pada tahun 2009, persentase penduduk miskin di Provinsi Papua Barat adalah 35,7 persen dan Provinsi Papua 37,5 persen. Data kemiskinan antarprovinsi menunjukkan dominasi penyebaran di perdesaan, baik berdasarkan

jumlah maupun persentase penduduk miskin. Di Provinsi Papua, jumlah dan persentase penduduk miskin, baik di kota maupun di desa cenderung menurun dalam periode 2000—2008. Walaupun persentase penduduk miskin di perdesaan cenderung menurun, persentase tersebut masih jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan di perkotaan. Demikian pula dengan di Provinsi Papua Barat, persentase penduduk miskin di perkotaan jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan di perdesaan. Hal ini menunjukkan adanya ketimpangan dalam distribusi pendapatan di wilayah perdesaan dengan wilayah perkotaan secara umum.

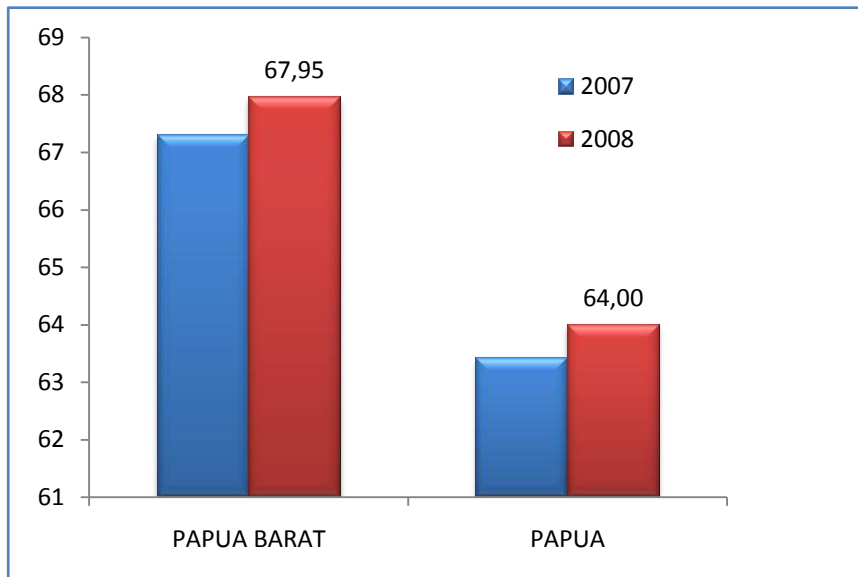
TABEL 8.3
PERSENTASE KEMISKINAN WILAYAH PAPUA TAHUN 2007—2009

Tahun	Papua Barat	Papua
2007	39,3	40,8
2008	35,1	37,1
2009	35,7	37,5

Sumber : Badan Pusat Statistik

Kualitas sumber daya manusia wilayah Papua cenderung masih rendah sebagaimana tercermin dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di wilayah Papua. Pada tahun 2008 IPM di Provinsi Papua sebesar 64,0 dan Provinsi Papua Barat sebesar 67,95.

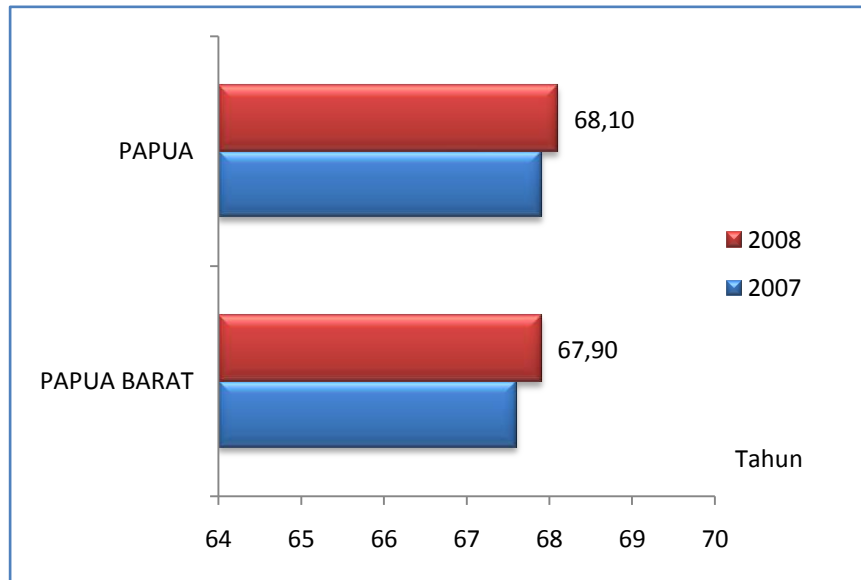
GAMBAR 8.4
INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA WILAYAH PAPUA TAHUN 2007—2008



Sumber : Badan Pusat Statistik (diolah)

Dalam aspek kesehatan angka umur harapan hidup (UHH) tergolong rendah. Angka UHH pada tahun 2008 di Provinsi Papua adalah 68,10 tahun, sedangkan di Provinsi Papua Barat adalah 67,90 tahun. Di wilayah Papua angka kematian bayi (AKB) tergolong tinggi. Persalinan yang dibantu tenaga medis masih tergolong rendah. Penduduk yang mempunyai keluhan terhadap kondisi kesehatan semakin meningkat. Penduduk yang berobat jalan ke fasilitas kesehatan sedikit lebih kecil daripada yang berupaya mengobati dirinya sendiri. Masalah penyediaan akses penduduk terhadap air bersih belum memadai. Kelayakan rumah tinggal yang memenuhi kelayakan kesehatan masih sedikit karena sebagian besar rumah tinggal penduduk tidak memiliki sirkulasi udara yang baik yang menyebabkan asap pekat dari perapian dari dalam rumah mengganggu pernapasan dan berakibat banyaknya penduduk yang terkena penyakit paru-paru. Penderita AIDS di Pulau Papua merupakan yang tertinggi di Indonesia. Jumlah penderita meningkat dari 1.070 jiwa (2005) menjadi 3.000 jiwa (2007). Kasus AIDS/HIV meningkat tajam dari 554 kasus baru tahun 2003 menjadi 4.114 kasus tahun 2008.

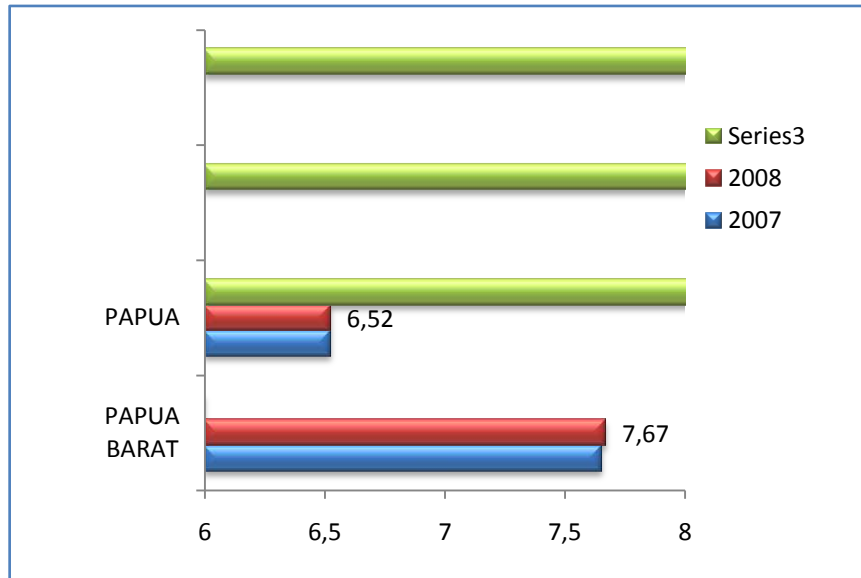
GAMBAR 8.5
UMUR HARAPAN HIDUP WILAYAH PAPUA TAHUN 2007—2008



Sumber : Badan Pusat Statistik (diolah)

Dalam aspek pendidikan di wilayah Papua, rata-rata lama sekolah belum mencapai target wajib belajar 9 tahun dan belum semua penduduk usia sekolah dapat bersekolah. Angka rata-rata lama sekolah di Provinsi Papua adalah 6,52 tahun dan angka rata-rata lama sekolah di Provinsi Papua Barat adalah 7,67 tahun. Layanan SD sudah mencukupi di Pulau Papua, tetapi, layanan kelas untuk SLTP dan SLTA tidak mencukupi. Penyebaran guru di Provinsi Papua tidak merata dan sebagian besar berkonsentrasi di kota dan sebagian meninggalkan tugas karena menjadi anggota legislatif atau eksekutif untuk daerah pemekaran baru.

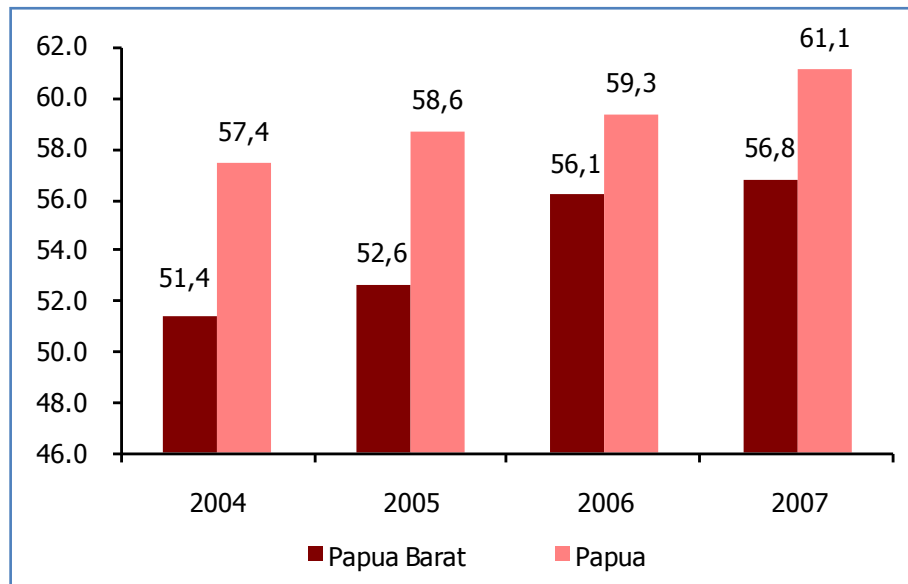
GAMBAR 8.6
RATA-RATA LAMA SEKOLAH WILAYAH PAPUA TAHUN 2007—2008



Sumber : Badan Pusat Statistik (diolah)

Demikian juga dengan Indeks Pembangunan Gender (IPG) (*Gender-related Development Index/GDI*) Indonesia, dihitung berdasarkan variabel yang sama dengan IPM menurut jenis kelamin. IPG di wilayah Papua meningkat pada tahun 2007 walaupun peningkatannya masih di bawah rata-rata nasional sebesar 65,8. IPG di Provinsi Papua sebesar 61,1 dan di Provinsi Papua Barat sebesar 56,8. Rendahnya nilai tersebut disebabkan oleh rendahnya persentase kontribusi dalam pendapatan dan umur harapan hidup (UHH) perempuan. Hal ini menunjukkan masih terjadinya kesenjangan gender antarprovinsi di wilayah Papua.

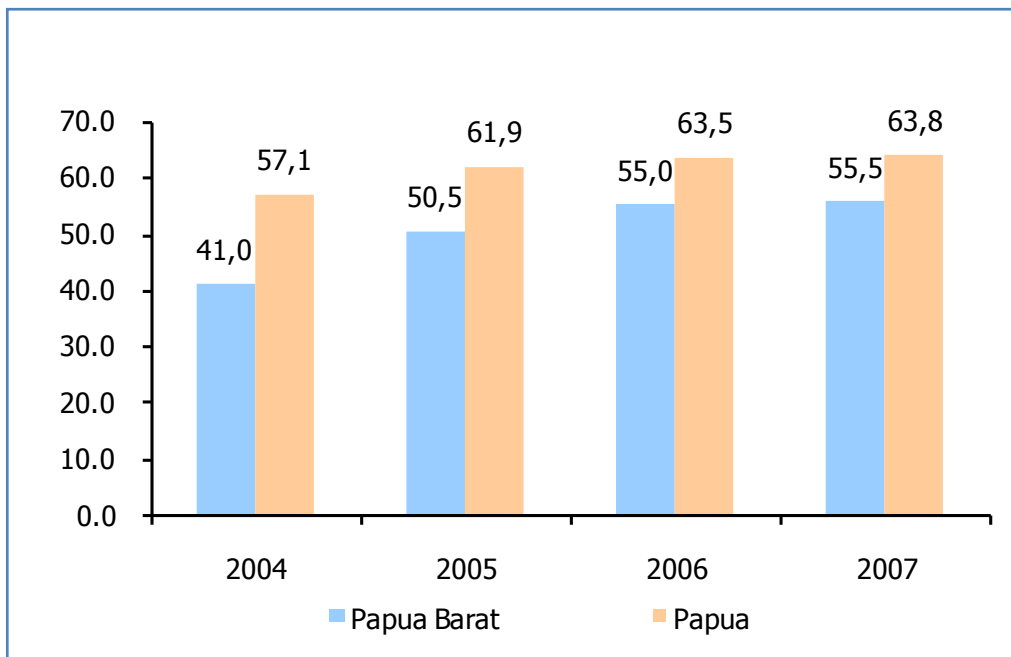
GAMBAR 8.7
PERKEMBANGAN INDEKS PEMBANGUNAN GENDER WILAYAH PAPUA TAHUN
2004—2007



Sumber: BPS dan Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan (diolah)

Selain indikator IPG, pembangunan gender juga ditunjukkan dengan indikator *Gender Empowerment Measurement* (GEM) atau Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), yang diukur melalui partisipasi perempuan di bidang ekonomi, politik, dan pengambilan keputusan. Di wilayah Papua, IDG tahun 2007 untuk tiap provinsi juga meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2006 meskipun nilainya masih lebih rendah jika dibandingkan dengan rata-rata nasional sebesar 62,1. Nilai IDG untuk Provinsi Papua dan Papua Barat masing-masing sebesar 63,8 dan 55,5. Rendahnya nilai tersebut disebabkan oleh rendahnya keterwakilan perempuan di parlemen, proporsi perempuan dalam pekerjaan profesional, tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK), dan upah nonpertanian perempuan. Di samping itu, upaya-upaya perlindungan perempuan dan anak, terutama terhadap berbagai tindak kekerasan juga perlu ditingkatkan mengingat hal tersebut merupakan salah satu prioritas lainnya di bidang kesejahteraan rakyat.

GAMBAR 8.8
PERKEMBANGAN INDEKS PEMBERDAYAAN GENDER WILAYAH PAPUA TAHUN
2004—2007



Sumber: BPS dan Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan (diolah)

Wilayah Papua merupakan salah satu pulau terbesar di Indonesia dengan potensi sumber daya alam sangat besar di sektor perikanan, perkebunan, kehutanan, dan pertambangan yang dapat dikelola secara optimal bagi kesejahteraan rakyat dan kemajuan wilayah. Wilayah Papua terletak di posisi paling timur dan berbatasan langsung dengan negara tetangga Papua Nugini. Pengembangan wilayah Papua menghadapi permasalahan yang sangat kompleks terutama akibat ketertinggalan dan keterisolasian. Pengembangan wilayah Papua juga memiliki tantangan yang lebih sulit jika dibandingkan dengan wilayah lain. Tantangan terbesar adalah memberikan perhatian yang sama terhadap seluruh wilayah pesisir, wilayah pegunungan, dan wilayah dataran, serta sekaligus membangun keterkaitan antarwilayah dalam satu kesatuan tata ruang wilayah. Program pembangunan harus dirancang secara khusus sesuai dengan kondisi geografis dan karakteristik masyarakat Papua. Kondisi geografis juga menghambat mobilitas sumber daya dan penduduk akibat minimnya jaringan transportasi. Terbatasnya ketersediaan jaringan transportasi tersebut menyebabkan masih rendahnya pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program pembangunan dan lemahnya pengawasan terhadap ketertiban dan keamanan wilayah yang sering menyebabkan munculnya potensi konflik dan separatisme.

Sebagai satu kesatuan wilayah, Papua sesungguhnya juga memiliki potensi pengembangan sangat besar yang berbasis kepada sumber daya alam terutama pertambangan, hutan, perikanan, perkebunan dan wisata bahari. Saat ini pengelolaan sumber daya tambang dan hutan belum memberikan dampak yang signifikan, baik bagi kemajuan daerah maupun tingkat kesejahteraan penduduk. Potensi sumber daya perikanan laut sangat besar dan masih belum dikelola secara optimal. Peluang untuk memanfaatkan sumber daya hutan dan perkebunan secara baik dan benar juga cukup besar sehingga masih ada peluang pengelolaan sumber daya tersebut untuk pengembangan ekonomi wilayah.

Rasio panjang jalan di Provinsi Papua 3,2 km per 1.000 penduduk. Di Papua Barat rasio panjang jalan 2,8 km per 1.000 penduduk. Transportasi laut berperan penting pada perekonomian karena sebagian besar mobilitas orang dan barang menggunakan transportasi laut. Pada tahun 2006 terdapat empat pelabuhan utama, yaitu Pelabuhan Sorong, Pelabuhan Manokwari, Pelabuhan Fak Fak dan Pelabuhan Kaimana. Selain itu, terdapat pelabuhan kecil yang melayani pelayaran perintis di daerah kepulauan, pesisir pantai dan sungai-sungai, yaitu pelabuhan perintis Wasior, Windesi, Oransbari, Saukorem, Sausapor, Saonek, Kalobo, Teminabuan, Inantawan, Bintuni, Babo dan Kokas. Transportasi udara menjadi penting karena karakteristik wilayah pegunungan diliputi hutan sehingga akses jalan darat menjadi sulit. Untuk mengatasi hal ini, dibutuhkan pembangunan prasarana perhubungan udara meliputi Lapangan Terbang Rendani di Manokwari, Domine Edward Osok dan Jefman di Sorong, Torea di Fak Fak, dan Tarum di Kaimana.

Kondisi ketenagalistrikan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat masuk dalam sistem kelistrikan wilayah Papua yang terdiri atas beberapa sistem yang terisolasi, antara lain Sistem Jayapura, Biak, Sorong, Merauke, Manokwari, dan Timika. Rasio elektrifikasi tahun 2007 untuk Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat adalah 32,05 persen dan rasio desa berlistrik untuk Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat adalah 30,2 persen. Kebutuhan tenaga listrik akan terus meningkat sejalan dengan perkembangan ekonomi daerah dan pertumbuhan penduduk. Semakin meningkat ekonomi pada suatu daerah, konsumsi tenaga listrik juga akan semakin meningkat. Kondisi ini tentunya harus diantisipasi sedini mungkin agar penyediaan tenaga listrik dapat tersedia dalam jumlah yang cukup dan harga yang memadai. Rasio elektrifikasi diharapkan akan menjadi 90 persen pada tahun 2025.

Perkembangan penataan ruang di Pulau Papua hingga saat ini dipengaruhi oleh berbagai isu, di antaranya terkait dengan hak ulayat (hak kepemilikan tanah adat) dan batas administrasi. Permasalahan yang terjadi adalah masyarakat adat Pulau Papua tidak dapat merasakan manfaat pengelolaan sumber daya alam tanah leluhur masyarakat Papua yang meliputi tanah hutan dan isinya, badan air dan isinya, bahan tambang dan mineral, dan lain-lain. Sejalan dengan perkembangannya, banyak kegiatan eksploitasi mineral dan hutan yang dilakukan di atas tanah adat tanpa melibatkan masyarakat adat Pulau Papua itu sendiri. Selain isu tersebut, terdapat isu lain dalam



penataan ruang wilayah di Pulau Papua, yaitu konflik batas administrasi yang tidak hanya terjadi antarkampung, tetapi juga antardistrik.

Penggunaan kawasan hutan pada dasarnya terbagi menjadi dua, yaitu kawasan lindung dan kawasan budi daya. Luas wilayah kawasan di Pulau Papua lebih dari 41 juta ha dari total luas kawasan nasional. Hal ini menunjukkan Pulau Papua memiliki keunggulan ekonomis dan lingkungan yang tinggi dipandang dari nilai hutan dan kekayaan alam serta habitatnya. Dari luas total kawasan hutan tersebut, proporsi terbesar digunakan sebagai kawasan budi daya (58 persen) dan selebihnya diperuntukkan bagi kawasan lindung. Hal ini sejalan dengan konsep tata ruang wilayah yang menyatakan bahwa kawasan budi daya seharusnya lebih luas jika dibandingkan dengan kawasan lindung meskipun tidak berarti bahwa kawasan lindung dapat semakin menurun mengingat fungsinya yang penting dalam sistem ekologi. Provinsi Papua memiliki luas wilayah lebih besar (77 persen) jika dibandingkan dengan Provinsi Papua Barat (23 persen). Dari sekitar 31,8 juta hektare luas kawasan di Papua, 44 persen digunakan sebagai kawasan lindung dan 56 persen lainnya adalah kawasan budi daya. Demikian pula dengan Provinsi Papua Barat yang mempunyai kawasan budi daya sekitar dua kali lipat kawasan hutan lindung.

Sebagai pulau tropis yang terbesar di dunia, Pulau Papua memiliki keragaman dan keunikan ekosistem yang mengagumkan, termasuk glasier dan ekosistem alpine, hutan berkabut, hutan hujan dataran rendah, padang rumput, hutan Mangrove, terumbu karang dan hamparan rumput laut. Banyak spesies memiliki status endemik atau secara alamiah tidak dapat ditemukan di tempat lain. Secara keseluruhan, Pulau Papua memiliki sedikitnya 500.000 jenis flora dan fauna. Dari jumlah tersebut, diduga sekitar 20.000 sampai 25.000 jenis tanaman hidup di wilayah Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Di Pulau Papua, lebih dari 90 persen luas wilayah kawasan lindung dan budi daya diperuntukkan bagi hutan. Dalam hal ini, Provinsi Papua Barat menyediakan 94 persen (9 juta ha) dari luas wilayah (9,7 juta ha) untuk hutan dan Papua Barat menyediakan 91 persen (29 juta) dari 29 juta ha bagi hutan lindung dan budi daya.

Permasalahan lain yang menonjol ialah menyangkut pelaksanaan otonomi daerah seperti inkonsistensi produk peraturan daerah, pemekaran wilayah administrasi, dan pemilihan kepala daerah secara langsung dan pelaksanaan otonomi khusus. Isu pemekaran wilayah dan pilkada tersebut memiliki dampak yang cukup panjang karena dapat menimbulkan konflik yang mengganggu keamanan, termasuk di antaranya konflik batas antarwilayah administrasi.

Hukum formal dan hukum adat hingga saat ini belum diatur secara harmonis dalam menangani masalah sosial, terutama yang terkait dengan sengketa hak ulayat dan konflik sosial budaya. Sementara itu, Undang-Undang Otonomi Khusus Papua telah mengatur kekuasaan peradilan yang mengakui pula peradilan adat. Perkembangan ini menghasilkan dualisme hukum di wilayah Papua.

GAMBAR 8.9
PETA KAWASAN PERBATASAN DI WILAYAH PAPUA



Sumber : Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal (diolah)

Wilayah Papua memiliki kawasan perbatasan, baik berupa perbatasan laut maupun perbatasan darat. Di kawasan perbatasan terjadi migrasi penduduk secara tradisional berkaitan dengan ikatan kekerabatan yang sudah lama terjalin. Kondisi tersebut dapat menyebabkan wilayah perbatasan berpotensi pula menjadi jalan bagi penurunan keamanan dalam negeri. Sementara itu, belum ada sarana dan prasarana fasilitas bea cukai, imigrasi, karantina, dan keamanan di perbatasan yang memadai sesuai dengan standar pelayanan publik dalam upaya pengawasan kawasan perbatasan secara intensif.

8.1.2 Isu Strategis

Dari uraian fakta potensi dan permasalahan di wilayah Papua, dapat ditarik beberapa isu strategis di wilayah Papua yaitu sebagai berikut.

1. **Optimalisasi pengembangan sektor dan komoditas unggulan**

Hal ini berkaitan dengan belum optimalnya sektor dan komoditas unggulan pertambangan, perikanan laut dan perkebunan yang ditunjukkan dengan belum optimalnya industri unggulan kakao dan kopi sebagai motor penggerak perekonomian di Provinsi Papua serta industri unggulan hasil laut sebagai penggerak perekonomian Provinsi Papua Barat. Pengembangan sektor dan

komoditas unggulan perlu didorong dengan peningkatan akses terhadap infrastruktur pendukung ekonomi, yaitu akses terhadap jalan, pelabuhan, listrik serta prasarana dan sarana pos dan telematika.

2. Pengamanan dan peningkatan kesejahteraan di wilayah perbatasan, tertinggal dan bencana

Hal ini berkaitan dengan masih adanya permasalahan batas desa dan fasilitas di daerah perbatasan serta rendahnya infrastruktur yang dapat diakses penduduk di pedalaman, tertinggal, dan perbatasan.

3. Optimalisasi tata pemerintahan yang baik dalam koridor otonomi khusus

Hal ini ditunjukkan oleh belum terimplementasikannya UU Otonomi Khusus secara menyeluruh di Provinsi Papua dan Papua Barat.

4. Rendahnya kualitas sumber daya manusia dan tingginya persentase kemiskinan

Rendahnya kualitas manusia merupakan konsekuensi rendahnya dan tidak meratanya akses terhadap pendidikan dasar dan menengah, rendahnya status kesehatan dan gizi masyarakat, serta tidak meratanya pendapatan per kapita. Hal ini juga ditunjukkan oleh tingginya kemiskinan di perdesaan dan pedalaman serta rendahnya akses terhadap pendidikan dasar dan menengah di Provinsi Papua dan Papua Barat.

5. Tingginya prevalensi kesakitan HIV/AIDS

Hal ini ditunjukkan oleh meningkatnya kasus AIDS/HIV di perkotaan dan perdesaan di wilayah Papua.

6. Tingginya potensi pelanggaran hak asasi manusia berbasis ikatan adat dan komunal

Hal ini ditunjukkan oleh tingginya kasus kekerasan dan hak asasi manusia dan risiko konflik pertanahan di Provinsi Papua dan Papua Barat.

7. Meningkatkan kebutuhan ketahanan pangan

Rendahnya luas panen dan produksi tanaman pangan di Provinsi Papua dan Papua Barat.

8. Keragaman hayati wilayah Papua dan Mitigasi Bencana

Hal ini ditunjukkan oleh tingginya keragaman hayati di Provinsi Papua dan Papua Barat serta tingginya potensi bencana alam di wilayah Papua, khususnya gempa bumi.

8.2 Arah Pengembangan Wilayah

Dengan memperhatikan rancangan Rencana Tata Ruang Wilayah Pulau, pengembangan wilayah Papua diarahkan untuk: (1) mendukung peningkatan serta memperkuat persatuan dan kesatuan serta keutuhan kehidupan bangsa dan pertahanan negara; (2) menempatkan hak ulayat di dalam penataan ruang sebagai salah satu upaya untuk mempertahankan nilai-nilai sosial budaya setempat; (3) memanfaatkan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara produktif dan efisien agar terhindar dari pemborosan dan penurunan daya dukung lingkungan sehingga dapat memberi manfaat sebesar-besarnya berdasarkan prinsip-prinsip kelestarian dan berkelanjutan; (4) mempertahankan kawasan lindung sekurang-kurangnya 50 persen dari luas wilayah Pulau Papua; (5) memacu pertumbuhan ekonomi wilayah Pulau Papua melalui pengembangan sektor-sektor unggulan yang berbasis sumber daya setempat dan meningkatkan keterkaitan antar pusat pertumbuhan wilayah; (6) menampung berbagai kegiatan ekonomi, memperluas lapangan kerja, dan sekaligus memenuhi fungsi sebagai pusat pelayanan usaha melalui pengembangan kawasan dan pusat pertumbuhan; (7) meningkatkan keterkaitan yang saling menguntungkan antara kawasan andalan dan tertinggal dalam rangka peningkatan kesejahteraan ekonomi daerah di sekitar kawasan andalan; (8) meningkatkan ketersediaan dan kualitas, serta memperluas jangkauan pelayanan prasarana dasar, khususnya transportasi laut yang didukung oleh transportasi antarmoda secara terpadu dan optimal dengan mengikutsertakan dunia usaha; serta (9) meningkatkan pengembangan wilayah pedalaman dan perbatasan yang tertinggal dan terisolasi dengan menyetarakan laju pertumbuhan antarwilayah.

Pengembangan Pusat Kegiatan Nasional (PKN) di wilayah Papua diarahkan untuk (1) mendorong pengembangan kota Sorong dan Jayapura sebagai pusat pelayanan primer yang sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan; (2) mendorong pengembangan kota Manokwari dan Timika sebagai pusat pelayanan sekunder yang sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Pengembangan Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) di kawasan perbatasan negara merupakan upaya untuk mendorong pengembangan kota-kota Tanah Merah, Merauke dan Jayapura. Pengembangan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) di wilayah Papua diarahkan untuk (1) mendorong pengembangan kota Fak Fak, Manokwari, Nabire, Biak, Merauke dan Wamena sebagai pusat pelayanan sekunder yang sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan; dan (2) mengendalikan pengembangan kota Bade, Muting, Arso, Ayamaru, Teminabuan, dan Sarmi sebagai pusat pelayanan tersier yang sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Pengembangan pusat kegiatan lokal di wilayah Papua ditetapkan melalui peraturan daerah provinsi berdasarkan usulan pemerintah kabupaten/kota dengan kriteria sebagaimana ditetapkan dalam RTRWN, dan pengembangan kota-kota PKL merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengembangan sistem pusat permukiman di wilayah Papua.

8.3 Tujuan dan Sasaran Pengembangan Wilayah

Berdasarkan arahan pengembangan wilayah Papua, tujuan pembangunan wilayah Papua untuk kurun waktu 2010—2014 adalah untuk:

1. meningkatkan standar hidup masyarakat di wilayah Papua;
2. meningkatkan aksesibilitas masyarakat wilayah Papua terhadap pelayanan publik dasar;
3. mewujudkan keseimbangan pembangunan wilayah Papua dan Papua Barat;
4. mewujudkan ketahanan dan kemandirian pangan;
5. melakukan transformasi struktural perekonomian di wilayah Papua yang didasarkan pada potensi dan keunggulan daerah;
6. meningkatkan sinergi dalam pengelolaan sumber daya hutan dan tambang dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan dan hak ulayat, perlindungan masyarakat adat, dan pengembangan usaha;
7. meningkatkan jumlah dan mutu sistem jaringan prasarana dasar (jalan, pelabuhan, lapangan udara, telekomunikasi, listrik dan telepon) yang menjangkau daerah-daerah tertinggal di wilayah Papua;
8. mengoptimalkan pelaksanaan otonomi khusus untuk kesejahteraan masyarakat dan kemajuan wilayah Papua.

Sesuai dengan tujuan pengembangan wilayah Pulau Papua, sasaran yang dicapai dalam rangka pengembangan wilayah Papua untuk kurun waktu 2010—2014 adalah sebagai berikut.

1. Meningkatnya standar hidup masyarakat Papua ditunjukkan dengan membaiknya berbagai indikator pembangunan, yaitu pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, pengangguran, angka kematian bayi, angka harapan hidup, serta pendapatan per kapita;
2. meningkatnya standar layanan jasa pendidikan di Papua;
3. meningkatnya standar layanan jasa kesehatan di Papua;
4. tercapainya tingkat produksi pangan dengan tingkat ketersediaan minimal 90 persen dari kebutuhan domestik untuk pengamanan kemandirian pangan di Papua;
5. meningkatnya peran sektor pertanian, perkebunan, dan pariwisata dalam perekonomian wilayah Papua;
6. meningkatnya peran masyarakat dalam pengelolaan sumber daya tambang dan hutan ;

7. berkembangnya jumlah dan mutu sistem jaringan prasarana dasar yang menjangkau daerah-daerah tertinggal di wilayah Papua;
8. meningkatnya mutu pengelolaan otonomi khusus dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan wilayah Papua.

TABEL 8.4
SASARAN PERTUMBUHAN EKONOMI, KEMISKINAN DAN PENGANGGURAN
DI WILAYAH PAPUA TAHUN 2010—2014

Provinsi	Pertumbuhan Ekonomi (%) ¹⁾		Kemiskinan (%) ²⁾		Pengangguran (%) ³⁾	
	2010	2014	2010	2014	2010	2014
Papua Barat	6,2—6,8	7,0—7,6	34,94—34,23	19,94—18,78	7,2—7,9	5,1—5,6
Papua	5,3—5,8	6,2—6,7	37,01—36,88	22,95—21,56	3,7—4,1	2,7—6,5

Sumber : Perhitungan Bappenas;BPS; Susenas;

*Keterangan: ¹⁾ *Pertumbuhan Ekonomi: persentase laju perubahan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).*

²⁾ *Kemiskinan: persentase jumlah penduduk miskin terhadap total jumlah penduduk.*

³⁾ *Pengangguran: persentase jumlah pengangguran terbuka terhadap total angkatan kerja.*

TABEL 8.5
SASARAN ANGKA KEMATIAN BAYI, ANGKA HARAPAN HIDUP,
RATA-RATA LAMA SEKOLAH DAN PENDAPATAN PERKAPITA
DI WILAYAH PAPUA TAHUN 2010—2014

Provinsi	Angka Kematian Bayi ¹⁾		Rata-Rata Lama Sekolah ²⁾		Angka Harapan Hidup ³⁾		Pendapatan Perkapita (Rp.Ribu) ⁴⁾	
	2010	2014	2010	2014	2010	2014	2010	2014
Papua Barat	32	27	7,57	8,37	69,13	70,47	9.924,79	11.610,20
Papua	31	27	6,58	6,86	69,38	70,63	9.712,80	11.556,90

Sumber : Perhitungan Bappenas;BPS; Susenas;

*Keterangan: ¹⁾ *Angka Kematian Bayi: jumlah bayi yang meninggal sebelum mencapai usia 1 tahun per 1000 kelahiran hidup.*

²⁾ *Rata-rata Lama Sekolah: rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani.*

³⁾ *Angka Harapan Hidup: perkiraan lama hidup rata-rata penduduk.*



4) Pendapatan per kapita: pendapatan regional dibagi dengan jumlah penduduk pada pertengahan tahun.

8.4 Arah Kebijakan dan Strategi Pengembangan

Berdasarkan arahan, tujuan, dan sasaran serta dengan mempertimbangkan isu strategis wilayah Papua, arah kebijakan dan strategi wilayah Papua kurun waktu 2010—2014 adalah sebagai berikut.

1. Pengembangan sektor dan komoditas unggulan dilakukan dengan strategi sebagai berikut:
 - a. mengembangkan sentra produksi pertanian (Papua);
 - b. mengembangkan sentra produksi perikanan laut (Papua Barat);
 - c. mengembangkan industri pengolahan perikanan laut (Papua Barat);
 - d. mengembangkan potensi wisata bahari Raja Ampat dan wisata budaya.
2. Pengembangan wilayah perbatasan dengan memadukan peningkatan kesejahteraan dan keamanan dilakukan dengan strategi pengembangan sebagai berikut:
 - a. menciptakan kepastian hukum internasional atas pemanfaatan SDA pada landas kontinen dan Zona Ekonomi Eksklusif;
 - b. mengelola kawasan perbatasan darat dengan memadukan pendekatan keamanan dan kesejahteraan.
3. Penguatan ekonomi daerah dilakukan dengan strategi pengembangan sebagai berikut:
 - a. meningkatkan kualitas proses legislasi;
 - b. meningkatkan penegakan hukum, HAM serta transparansi, dan akuntabilitas kebijakan publik;
 - c. meningkatkan kualitas pelayanan publik.
4. Peningkatan kesejahteraan rumah tangga miskin khususnya di perdesaan dilakukan dengan strategi pengembangan sebagai berikut:
 - a. meningkatkan kapasitas penduduk perdesaan dan rumah tangga miskin, baik secara individual maupun berkelompok;
 - b. memperluas kesempatan dan peluang pengembangan ekonomi lokal;
 - c. meningkatkan cakupan dan sebaran program penanggulangan kemiskinan.

5. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dilakukan dengan strategi pengembangan sebagai berikut:
 - a. meningkatkan akses pelayanan pendidikan dan keterampilan kerja;
 - b. meningkatkan akses pelayanan kesehatan.
6. Pengendalian HIV/AIDS, dilakukan dengan strategi pengembangan sebagai berikut:
 - a. meningkatkan upaya pencegahan penularan HIV/AIDS.
7. Peningkatan kesadaran dan penghormatan terhadap hak asasi manusia dilakukan dengan strategi pengembangan sebagai berikut:
 - a. memperkuat kelembagaan pemerintahan di tingkat lokal;
 - b. menghormati dan memperkuat lembaga adat;
 - c. meningkatkan kerja sama antara kepolisian dan pemuka adat dalam penanganan konflik.
8. Peningkatan ketahanan pangan di tingkat wilayah dilakukan dengan strategi pengembangan sebagai berikut:
 - a. meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman pangan;
 - b. memperkuat interaksi perdagangan antarwilayah;
 - c. melaksanakan diversifikasi pangan.
9. Pelestarian dan pemanfaatan keragaman hayati di wilayah Papua dilakukan dengan strategi pengembangan mengarusutamakan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dalam kebijakan publik.
10. Peningkatan kewaspadaan dini terhadap potensi bencana alam dilakukan dengan strategi mengembangkan sistem mitigasi bencana.

MATRIK BUKU III RPJMN 2010-2014 WILAYAH PAPUA
ISU STRATEGIS, ARAH KEBIJAKAN, WILAYAH, STRATEGI PEMBANGUNAN, DAN KEGIATAN PRIORITAS

ISU STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN	WILAYAH	STRATEGI PENGEMBANGAN	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS
<p>Optimalisasi pengembangan sektor dan komoditas unggulan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dominasi peran sektor sumber daya alam tak terbarukan dalam perekonomian Provinsi Papua • Belum optimalnya industri unggulan kakao dan kopi sebagai motor penggerak perekonomian di Provinsi Papua • Belum optimalnya peran industri unggulan hasil laut sebagai penggerak perekonomian Provinsi Papua Barat 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan sektor dan komoditas unggulan 	<ul style="list-style-type: none"> • Papua 	<ul style="list-style-type: none"> • Mengembangkan sentra produksi pertanian 	<p>Prioritas Nasional</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penataan regulasi untuk menjamin kepastian hukum atas lahan pertanian • Pengembangan areal pertanian baru • Penertiban, serta optimalisasi penggunaan lahan terlantar • Pembangunan dan pemeliharaan sarana transportasi dan angkutan yang melayani daerah-daerah sentra produksi pertanian demi peningkatan kuantitas dan kualitas produksi serta kemampuan pemasarannya • Pembangunan dan pemeliharaan pengairan yang melayani daerah-daerah sentra produksi pertanian demi peningkatan kuantitas dan kualitas produksi • Pembangunan dan pemeliharaan jaringan listrik yang melayani daerah-daerah sentra produksi pertanian demi peningkatan kuantitas dan kualitas produksi • Pembangunan dan pemeliharaan teknologi komunikasi dan sistem informasi nasional yang melayani daerah-daerah sentra produksi pertanian demi peningkatan kuantitas dan kualitas produksi serta kemampuan pemasarannya • Peningkatan upaya penelitian dan pengembangan bidang pertanian yang mampu menciptakan benih unggul dan hasil penelitian lainnya menuju kualitas dan produktivitas hasil pertanian nasional yang tinggi • Dorongan untuk investasi pangan, pertanian, dan industri perdesaan berbasis produk lokal oleh pelaku usaha dan pemerintah

ISU STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN	WILAYAH	STRATEGI PENGEMBANGAN	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS
				<ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan pembiayaan yang terjangkau • Sistem subsidi yang menjamin ketersediaan benih varietas unggul yang teruji, pupuk, teknologi dan sarana pasca panen yang sesuai secara tepat waktu, tepat jumlah, dan terjangkau • Pengambilan langkah-langkah konkrit terkait adaptasi dan antisipasi sistem pangan dan pertanian terhadap perubahan iklim • Konsolidasi kebijakan penanganan dan pemanfaatan tanah untuk kepentingan umum secara menyeluruh dibawah satu atap dan pengelolaan tata ruang secara terpadu • Penyelesaian pembangunan Lintas Papua • Pembangunan jaringan prasarana dan penyediaan sarana transportasi antar moda dan antar pulau yang terintegrasi sesuai dengan sistem transportasi nasional dan cetak biru transportasi multimoda • Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya • Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku • Penuntasan pembangunan jaringan serat optik di Indonesia Bagian Timur sebelum 2013 • Penyediaan Jasa Telekomunikasi • Peningkatan Deregulasi Kebijakan • Pengembangan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) • Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Penanaman Modal • Administrasi Badan Hukum • Peningkatan Kelancaran Distribusi Bahan Pokok • Revitalisasi Pasar Tradisional

III.M.8-2

ISU STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN	WILAYAH	STRATEGI PENGEMBANGAN	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS
				<ul style="list-style-type: none"> • Koordinasi Penataan dan Pengembangan Sistem Logistik Nasional • Pengembangan dan penetapan sistem logistik nasional yang menjamin kelancaran arus barang dan mengurangi biaya transaksi/ekonomi biaya tinggi • Pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan di bidang lalu lintas dan angkutan laut (Pembangunan kapal perintis dan subsidi operasi perintis) • Pengelolaan dan pembangunan kegiatan di bidang pelabuhan dan pengerukan • Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Jalan Nasional • Pengelolaan Fasilitasi Ekspor dan Impor • Perumusan Kebijakan dan Pengembangan Teknologi Informasi Kepabeanan dan Cukai • Pengelolaan dan Pembangunan Kegiatan di bidang pelabuhan dan pengerukan • Pengembangan sertifikasi sistem elektronik jasa aplikasi dan konten untuk mendukung transaksi elektronik • Koordinasi pengembangan dan penerapan sistem National Single Window/NSW dan ASEAN Single Window/ASW • Koordinasi pengembangan urusan penataan ruang dan pengembangan wilayah • Penetapan kebijakan energi yang memastikan penanganan energi nasional yang terintegrasi sesuai dengan Rencana Induk Energi Nasional • Peningkatan kapasitas pembangkit listrik melalui Pembangkit PLTD (Unit/kW) • Peningkatan kapasitas pembangkit listrik melalui Jaringan Transmisi Tenaga Listrik (kms) • Peningkatan kapasitas pembangkit listrik melalui Gardu Induk Transmisi Tenaga Listrik (kms) • Peningkatan kapasitas pembangkit listrik melalui Gardu Distribusi kVA • Peningkatan kapasitas pembangkit listrik melalui JTM

ISU STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN	WILAYAH	STRATEGI PENGEMBANGAN	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS
				<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kapasitas pembangkit listrik melalui JTR • pelaksanaan Survei Umum di Wilayah Terbuka \ • Pengembangan Energi Alternatif <ul style="list-style-type: none"> ❖ Listrik Desa (EBT) ❖ PLTS Tersebar ❖ PLTS Terpusat ❖ PLTMH (kW) ❖ PLT Angin (kW) • Pembangunan unit pengolahan Biofuel • Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman tahunan (Penyediaan Bahan bakar Bio Energi) <p>Prioritas Pulau</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pemanfaatan penerimaan dari hasil sumber daya alam pertambangan untuk pembangunan prasarana dan sarana penunjang pertanian • Pembangunan prasarana jaringan jalan Jayapura-Nimbrokang-Sarmi dan Jayapura-Wamena-Mulia
		<ul style="list-style-type: none"> • Papua Barat 	<ul style="list-style-type: none"> • Mengembangkan sentra produksi perikanan laut 	<p>Prioritas Nasional</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan dan pemeliharaan sarana transportasi dan angkutan yang melayani daerah-daerah sentra produksi pertanian demi peningkatan kuantitas dan kualitas produksi serta kemampuan pemasarannya • Pembangunan dan pemeliharaan jaringan listrik yang melayani daerah-daerah sentra produksi pertanian demi peningkatan kuantitas dan kualitas produksi • Pembangunan dan pemeliharaan teknologi komunikasi dan sistem informasi nasional yang

ISU STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN	WILAYAH	STRATEGI PENGEMBANGAN	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS
				<p>melayani daerah-daerah sentra produksi pertanian demi peningkatan kuantitas dan kualitas produksi serta kemampuan pemasarannya</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan upaya penelitian dan pengembangan bidang pertanian yang mampu menciptakan benih unggul dan hasil penelitian lainnya menuju kualitas dan produktivitas hasil pertanian nasional yang tinggi • Dorongan untuk investasi pangan, pertanian, dan industri perdesaan berbasis produk lokal oleh pelaku usaha dan pemerintah • Penyediaan pembiayaan yang terjangkau • Pengambilan langkah-langkah konkrit terkait adaptasi danantisipasi sistem pangan dan pertanian terhadap perubahan iklim • Penyelesaian pembangunan Lintas Papua • Pembangunan jaringan prasarana dan penyediaan sarana transportasi antar moda dan antar pulau yang terintegrasi sesuai dengan sistem transportasi nasional dan cetak biru transportasi multimoda • Penuntasan pembangunan jaringan serat optik di Indonesia Bagian Timur sebelum 2013 • Penyediaan Jasa Telekomunikasi • Peningkatan Deregulasi Kebijakan • Pengembangan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) • Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Penanaman Modal • Administrasi Badan Hukum • Peningkatan Kelancaran Distribusi Bahan Pokok

ISU STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN	WILAYAH	STRATEGI PENGEMBANGAN	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS
				<ul style="list-style-type: none"> • Revitalisasi Pasar Tradisional • Koordinasi Penataan dan Pengembangan Sistem Logistik Nasional • Pengembangan dan penetapan sistem logistik nasional yang menjamin kelancaran arus barang dan mengurangi biaya transaksi/ekonomi biaya tinggi • Pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan di bidang lalu lintas dan angkutan laut (Pembangunan kapal perintis dan subsidi operasi perintis) • Pengelolaan dan pembangunan kegiatan di bidang pelabuhan dan pengerukan • Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Jalan Nasional • Pengelolaan Fasilitas Ekspor dan Impor • Perumusan Kebijakan dan Pengembangan Teknologi Informasi Kepabeanan dan Cukai • Pengelolaan dan Pembangunan Kegiatan di bidang pelabuhan dan pengerukan • Pengembangan sertifikasi sistem elektronik jasa aplikasi dan konten untuk mendukung transaksi elektronik • Koordinasi pengembangan dan penerapan sistem National Single Window/NSW dan ASEAN Single Window/ASW • Koordinasi pengembangan urusan penataan ruang dan pengembangan wilayah • Penetapan kebijakan energi yang memastikan penanganan energi nasional yang terintegrasi sesuai dengan Rencana Induk Energi Nasional • Peningkatan kapasitas pembangkit listrik melalui Pembangkit PLTD (Unit/kW) • Peningkatan kapasitas pembangkit listrik melalui Jaringan Transmisi Tenaga Listrik (kms) • Peningkatan kapasitas pembangkit listrik melalui Gardu Induk Transmisi Tenaga Listrik (kms) • Peningkatan kapasitas pembangkit listrik melalui Gardu Distribusi kVA

ISU STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN	WILAYAH	STRATEGI PENGEMBANGAN	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS
				<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kapasitas pembangkit listrik melalui JTM • Peningkatan kapasitas pembangkit listrik melalui JTR • pelaksanaan Survei Umum di Wilayah Terbuka • Pengembangan Energi Alternatif <ul style="list-style-type: none"> ❖ Listrik Desa (EBT) ❖ PLTS Tersebar ❖ PLTS Terpusat ❖ PLTMH (kW) ❖ PLT Angin (kW) • Pembangunan unit pengolahan Biofuel • Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman tahunan (Penyediaan Bahan bakar Bio Energi) <p>Prioritas Pulau</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan penguasaan teknologi perikanan • Pembangunan prasarana pendukung pembekuan ikan • Peningkatan distribusi input produksi (bahan bakar, armada perahu) • Peningkatan interkoneksi sentra produksi dan pusat industri pengolahan hasil laut
			<ul style="list-style-type: none"> • Mengembangkan industri pengolahan perikanan laut 	<p>Prioritas Nasional</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan dan pemeliharaan jaringan listrik yang melayani daerah-daerah sentra produksi pertanian demi peningkatan kuantitas dan kualitas produksi • Pembangunan dan pemeliharaan teknologi komunikasi dan sistem informasi nasional yang melayani daerah-daerah sentra produksi pertanian demi peningkatan kuantitas dan kualitas produksi serta kemampuan pemasarannya

ISU STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN	WILAYAH	STRATEGI PENGEMBANGAN	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS
				<ul style="list-style-type: none"> • Dorongan untuk investasi pangan, pertanian, dan industri perdesaan berbasis produk lokal oleh pelaku usaha dan pemerintah • Penyediaan pembiayaan yang terjangkau • Penyelesaian pembangunan Lintas Papua • Pembangunan jaringan prasarana dan penyediaan sarana transportasi antar moda dan antar pulau yang terintegrasi sesuai dengan sistem transportasi nasional dan cetak biru transportasi multimoda • Penurunan tingkat kecelakaan transportasi • Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku • Penuntasan pembangunan jaringan serat optik di Indonesia Bagian Timur sebelum 2013 • Penyediaan Jasa Telekomunikasi • Peningkatan Deregulasi Kebijakan • Pengembangan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) • Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Penanaman Modal • Administrasi Badan Hukum • Peningkatan Kelancaran Distribusi Bahan Pokok • Revitalisasi Pasar Tradisional • Koordinasi Penataan dan Pengembangan Sistem Logistik Nasional • Perumusan Kebijakan dan Bimbingan Teknis Fasilitas Bidang Kepabeanaan • Pengembangan dan penetapan sistem logistik nasional yang menjamin kelancaran arus barang dan mengurangi biaya transaksi/ekonomi biaya tinggi

ISU STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN	WILAYAH	STRATEGI PENGEMBANGAN	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS
				<ul style="list-style-type: none"> • Pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan di bidang lalu lintas dan angkutan laut (Pembangunan kapal perintis dan subsidi operasi perintis) • Pengelolaan dan pembangunan kegiatan di bidang pelabuhan dan pengerukan • Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Jalan Nasional • Pengelolaan Fasilitasi Ekspor dan Impor • Perumusan Kebijakan dan Pengembangan Teknologi Informasi Kepabeanan dan Cukai • Pengelolaan dan Pembangunan Kegiatan di bidang pelabuhan dan pengerukan • Pengembangan sertifikasi sistem elektronik jasa aplikasi dan konten untuk mendukung transaksi elektronik • Koordinasi pengembangan dan penerapan sistem National Single Window/NSW dan ASEAN Single Window/ASW • Koordinasi pengembangan urusan penataan ruang dan pengembangan wilayah • Menyempurnaan peraturan ketenagakerjaan dan sinkronisasi kebijakan ketenagakerjaan (pusat) dengan kebijakan/ peraturan daerah • Penguatan lembaga hubungan industrial: (a) mendorong pembentukan lembaga bipartite; (b) Penguatan perundingan antara perwakilan pekerja dan pengusaha dengan meningkatkan teknik-teknik bernegosiasi; (c) Peningkatan kualitas penyelesaian perselisihan • Penerapan Keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di perusahaan sesuai standard an manajemen K3 • Penetapan kebijakan energi yang memastikan penanganan energi nasional yang terintegrasi sesuai dengan Rencana Induk Energi Nasional • Peningkatan kapasitas pembangkit listrik melalui Pembangkit PLTD (Unit/kW)

ISU STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN	WILAYAH	STRATEGI PENGEMBANGAN	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS
		<ul style="list-style-type: none"> • Papua Barat • Papua 	<ul style="list-style-type: none"> • Mengembangkan potensi wisata bahari Raja Ampat dan Wisata Budaya 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kapasitas pembangkit listrik melalui Jaringan Transmisi Tenaga Listrik (kms) • Peningkatan kapasitas pembangkit listrik melalui Gardu Induk Transmisi Tenaga Listrik (kms) • Peningkatan kapasitas pembangkit listrik melalui Gardu Distribusi kVA • Peningkatan kapasitas pembangkit listrik melalui JTM • Peningkatan kapasitas pembangkit listrik melalui JTR • pelaksanaan Survei Umum di Wilayah Terbuka • Pengembangan Energi Alternatif <ul style="list-style-type: none"> ❖ Listrik Desa (EBT) ❖ PLTS Tersebar ❖ PLTS Terpusat ❖ PLTMH (kW) ❖ PLT Angin (kW) • Pembangunan unit pengolahan Biofuel • Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman tahunan (Penyediaan Bahan bakar Bio Energi) • Pembangunan Jaringan Gas Prioritas Pulau <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan penguasaan teknologi pengolahan perikanan laut Prioritas Nasional <ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan pembiayaan yang terjangkau • Penyelesaian pembangunan Lintas Papua • Pembangunan jaringan prasarana dan penyediaan sarana transportasi antar moda dan antar

ISU STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN	WILAYAH	STRATEGI PENGEMBANGAN	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS
				<p>pulau yang terintegrasi sesuai dengan sistem transportasi nasional dan cetak biru transportasi multimoda</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penurunan tingkat kecelakaan transportasi • Penuntasan pembangunan jaringan serat optik di Indonesia Bagian Timur sebelum 2013 • Penyediaan Jasa Telekomunikasi • Peningkatan Deregulasi Kebijakan • Pengembangan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) • Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Penanaman Modal • Administrasi Badan Hukum • Pengembangan dan penetapan sistem logistik nasional yang menjamin kelancaran arus barang dan mengurangi biaya transaksi/ekonomi biaya tinggi • Pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan di bidang lalu lintas dan angkutan laut (Pembangunan kapal perintis dan subsidi operasi perintis) • Pengelolaan dan pembangunan kegiatan di bidang pelabuhan dan pengerukan • Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Jalan Nasional • Pengembangan sertifikasi sistem elektronik jasa aplikasi dan konten untuk mendukung transaksi elektronik • Koordinasi pengembangan dan penerapan sistem National Single Window/NSW dan ASEAN Single Window/ASW • Penguatan lembaga hubungan industrial: (a) mendorong pembentukan lembaga bipartite; (b) Penguatan perundingan antara perwakilan pekerja dan pengusaha dengan meningkatkan

ISU STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN	WILAYAH	STRATEGI PENGEMBANGAN	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS
				<p>teknik-teknik bernegosiasi; (c) Peningkatan kualitas penyelesaian perselisihan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penerapan Keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di perusahaan sesuai standard an manajemen K3 • Penetapan kebijakan energi yang memastikan penanganan energi nasional yang terintegrasi sesuai dengan Rencana Induk Energi Nasional • Peningkatan kapasitas pembangkit listrik melalui Pembangkit PLTD (Unit/kW) • Peningkatan kapasitas pembangkit listrik melalui Jaringan Transmisi Tenaga Listrik (kms) • Peningkatan kapasitas pembangkit listrik melalui Gardu Induk Transmisi Tenaga Listrik (kms) • Peningkatan kapasitas pembangkit listrik melalui Gardu Distribusi kVA • Peningkatan kapasitas pembangkit listrik melalui JTM • Peningkatan kapasitas pembangkit listrik melalui JTR • pelaksanaan Survei Umum di Wilayah Terbuka • Pengembangan Energi Alternatif <ul style="list-style-type: none"> ❖ Listrik Desa (EBT) ❖ PLTS Tersebar ❖ PLTS Terpusat ❖ PLTMH (kW) ❖ PLT Angin (kW) • Pengembangan Pengelolaan Peninggalan Kepurbakalaan • Pengembangan Pengelolaan Permuseuman • Penelitian dan Pengembangan Bidang Arkeologi • Penelitian dan Pengembangan Bidang Kebudayaan

ISU STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN	WILAYAH	STRATEGI PENGEMBANGAN	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS
				<ul style="list-style-type: none"> • Pelestarian dan Pengembangan Kesenian Prioritas Pulau <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan interkoneksi tujuan wisata dan kota-kota besar nasional • Peningkatan fasilitas penunjang pariwisata • Peningkatan promosi wisata • Penyiapan sumber daya manusia bidang pariwisata
Pengamanan dan peningkatan kesejahteraan di wilayah perbatasan <ul style="list-style-type: none"> • Minimnya fasilitas di daerah perbatasan • Rendahnya aksesibilitas penduduk di pedalaman, tertinggal dan perbatasan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan wilayah perbatasan dengan memadukan peningkatan kesejahteraan dan keamanan 	<ul style="list-style-type: none"> • Papua • Papua Barat 	<ul style="list-style-type: none"> • Menciptakan kepastian hukum internasional atas pemanfaatan SDA pada Landas Kontinen dan Zona Ekonomi Eksklusif 	Prioritas Nasional <ul style="list-style-type: none"> • Koordinasi pengembangan urusan penataan ruang dan pengembangan wilayah • Pelaksanaan kebijakan khusus dalam bidang infrastruktur dan pendukung kesejahteraan lainnya yang dapat mendorong pertumbuhan di daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan pasca-konflik • Pembentukan kerjasama dengan negara-negara tetangga dalam rangka pengamanan wilayah dan sumber daya kelautan • Penyelesaian pemetaan wilayah perbatasan RI dengan Malaysia, Papua Nugini, Timor Leste, dan Filipina pada 2010 Prioritas Pulau <ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan sarana dan prasarana patroli perbatasan laut Prioritas Nasional <ul style="list-style-type: none"> • Koordinasi pengembangan urusan penataan ruang dan pengembangan wilayah • Pelaksanaan kebijakan khusus dalam bidang infrastruktur dan pendukung kesejahteraan lainnya yang dapat mendorong pertumbuhan di daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan pasca-konflik

ISU STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN	WILAYAH	STRATEGI PENGEMBANGAN	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS
				<ul style="list-style-type: none"> • Pembentukan kerjasama dengan negara-negara tetangga dalam rangka pengamanan wilayah dan sumber daya kelautan • Pengentasan daerah tertinggal <p>Prioritas Pulau</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan sarana dan prasarana lintas batas, pertahanan, dan keamanan • Penataan administrasi kependudukan • Peningkatan akses pendidikan • Peningkatan akses pelayanan kesehatan • Peningkatan pelatihan ketrampilan kerja • Peningkatan aksesibilitas dengan membangun sistem jaringan transportasi • Pengembangan keterkaitan antara wilayah perbatasan dan pusat-pusat kegiatan ekonomi wilayah (PKN, PKW)
<p>Optimalisasi tata pemerintahan yang baik dalam koridor otonomi khusus</p> <ul style="list-style-type: none"> • Belum terimplementasikannya UU Otonomi Khusus secara menyeluruh di Provinsi Papua dan Papua Barat 	<ul style="list-style-type: none"> • Penguatan otonomi daerah 	<ul style="list-style-type: none"> • Papua • Papua Barat 	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan kualitas proses legislasi 	<p>Prioritas Nasional</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembinaan administrasi pejabat negara di daerah dan DPRD • Pendidikan dan pelatihan Bidang Pemerintahan dan Politik • Penataan Produk Hukum dan Pelayanan Bantuan Hukum Departemen • Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan • Penataan Produk Hukum dan Pelayanan Bantuan Hukum Departemen <p>Prioritas Pulau</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan Kinerja Kelembagaan Demokrasi • Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik
			<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan penegakan 	<p>Prioritas Nasional</p>

ISU STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN	WILAYAH	STRATEGI PENGEMBANGAN	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS
			<p>hukum, HAM, serta transparansi dan akuntabilitas kebijakan publik</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pembinaan Administrasi Anggaran Daerah • Pembinaan dan Fasilitasi Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah • Pembinaan administrasi pejabat negara di daerah dan DPRD • Pendidikan dan pelatihan Bidang Pemerintahan dan Politik • Penataan Urusan Pemerintahan Daerah dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah • Penataan Produk Hukum dan Pelayanan Bantuan Hukum Departemen • Peningkatan integrasi dan integritas penerapan dan penegakan hukum oleh seluruh lembaga dan aparat hukum • Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan • Penataan Produk Hukum dan Pelayanan Bantuan Hukum Departemen • Menyempurnaan peraturan ketenagakerjaan dan sinkronisasi kebijakan ketenagakerjaan (pusat) dengan kebijakan/ peraturan daerah • Penguatan lembaga hubungan industrial: (a) mendorong pembentukan lembaga bipartite; (b) Penguatan perundingan antara perwakilan pekerja dan pengusaha dengan meningkatkan teknik-teknik bernegosiasi; (c) Peningkatan kualitas penyelesaian perselisihan • Penerapan Keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di perusahaan sesuai standard an manajemen K3
			<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan kualitas pelayanan publik 	<p>Prioritas Nasional</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penataan Daerah Otonom dan Otonomi Khusus • Pembinaan dan Fasilitasi Dana Perimbangan • Pembinaan Administrasi Anggaran Daerah • Pembinaan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian

ISU STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN	WILAYAH	STRATEGI PENGEMBANGAN	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS
				<ul style="list-style-type: none"> • Penataan Urusan Pemerintahan Daerah dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah • Pengembangan Kapasitas dan Evaluasi Kinerja Daerah • Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerjasama Daerah • Penetapan dan penerapan sistem indikator kinerja utama pelayanan publik yang selaras antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah • Pengelolaan Informasi Manajemen Kependudukan • Pengelolaan Data dan Informasi Pertanahan
<p>Kualitas sumberdaya manusia dan tingginya persentase kemiskinan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rendahnya IPM • Tingginya persentase dan kedalaman kemiskinan di perdesaan • Rendahnya akses terhadap pendidikan dasar dan menengah di Provinsi Papua dan Papua Barat • Tingginya potensi busung lapar dan gizi buruk 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kesejahteraan rumah tangga miskin khususnya di perdesaan 	<ul style="list-style-type: none"> • Papua • Papua Barat 	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan kapasitas penduduk perdesaan dan rumah tangga miskin baik secara individual maupun berkelompok <hr/> <ul style="list-style-type: none"> • memperluas kesempatan dan peluang pengembangan ekonomi lokal 	<p>Prioritas Nasional</p> <ul style="list-style-type: none"> • Integrasi Program Perlindungan Sosial berbasis keluarga (PKH, bantuan pangan, jamkesmas, beasiswa anak keluarga berpendapatan rendah, PAUD • Peningkatan kualitas gizi dan keanekaragaman pangan melalui pola pangan harapan <p>Prioritas Pulau</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan Kapasitas UMKM yang berpotensi menyerap tenaga kerja penduduk miskin • Peningkatan pelatihan ketrampilan kerja • Pengembangan kewirausahaan di wilayah perdesaan • Peningkatan pendampingan (fasilitasi) masyarakat • Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pengambilan kebijakan publik <p>Prioritas Nasional</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan areal pertanian baru • Penertiban, serta optimalisasi penggunaan lahan terlantar • Pembangunan dan pemeliharaan sarana transportasi dan angkutan yang melayani daerah-daerah sentra produksi pertanian demi peningkatan kuantitas dan kualitas produksi serta

ISU STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN	WILAYAH	STRATEGI PENGEMBANGAN	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS
				<p>kemampuan pemasarannya</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan dan pemeliharaan pengairan yang melayani daerah-daerah sentra produksi pertanian demi peningkatan kuantitas dan kualitas produksi • Pembangunan dan pemeliharaan jaringan listrik yang melayani daerah-daerah sentra produksi pertanian demi peningkatan kuantitas dan kualitas produksi • Dorongan untuk investasi pangan, pertanian, dan industri perdesaan berbasis produk lokal oleh pelaku usaha dan pemerintah • Penyediaan pembiayaan yang terjangkau • Sistem subsidi yang menjamin ketersediaan benih varietas unggul yang teruji, pupuk, teknologi dan sarana pasca panen yang sesuai secara tepat waktu, tepat jumlah, dan terjangkau • Penyelesaian pembangunan Lintas Papua • Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya • Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku • Penuntasan pembangunan jaringan serat optik di Indonesia Bagian Timur sebelum 2013 • Penyediaan Jasa Telekomunikasi • Peningkatan Deregulasi Kebijakan • Kepastian hukum Pembentukan Peraturan perundang-undangan • Pengembangan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) • Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Penanaman Modal • Peningkatan Kelancaran Distribusi Bahan Pokok • Revitalisasi Pasar Tradisional

ISU STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN	WILAYAH	STRATEGI PENGEMBANGAN	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS
				<ul style="list-style-type: none"> • Koordinasi Penataan dan Pengembangan Sistem Logistik Nasional • Pengembangan dan penetapan sistem logistik nasional yang menjamin kelancaran arus barang dan mengurangi biaya transaksi/ekonomi biaya tinggi • Penetapan kebijakan energi yang memastikan penanganan energi nasional yang terintegrasi sesuai dengan Rencana Induk Energi Nasional • Peningkatan kapasitas pembangkit listrik melalui Pembangkit PLTD (Unit/kW) • Peningkatan kapasitas pembangkit listrik melalui Jaringan Transmisi Tenaga Listrik (kms) • Peningkatan kapasitas pembangkit listrik melalui Gardu Induk Transmisi Tenaga Listrik (kms) • Peningkatan kapasitas pembangkit listrik melalui Gardu Distribusi kVA • Peningkatan kapasitas pembangkit listrik melalui JTM • Peningkatan kapasitas pembangkit listrik melalui JTR • pelaksanaan Survei Umum di Wilayah Terbuka • Pengembangan Energi Alternatif <ul style="list-style-type: none"> ❖ Listrik Desa (EBT) ❖ PLTS Tersebar ❖ PLTS Terpusat ❖ PLTMH (kW) ❖ PLT Angin (kW) • Pembangunan unit pengolahan Biofuel • Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman tahunan (Penyediaan Bahan bakar Bio Energi)

ISU STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN	WILAYAH	STRATEGI PENGEMBANGAN	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS
				<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan kebijakan khusus dalam bidang infrastruktur dan pendukung kesejahteraan lainnya yang dapat mendorong pertumbuhan di daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan pasca-konflik • Pengentasan daerah tertinggal <p>Prioritas Pulau</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan fasilitasi kemitraan lintas pelaku dalam pengembangan ekonomi lokal • Peningkatan fasilitasi promosi produk wilayah perdesaan
			<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan cakupan dan sebaran program penanggulangan kemiskinan 	<p>Prioritas Nasional</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penambahan anggaran PNPB Mandiri dari Rp. 10,3 T pada tahun 2009 menjadi Rp. 12,1 T pada tahun 2010 • Peningkatan Kelancaran Distribusi Bahan Pokok <p>Prioritas Pulau</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan efektivitas pelaksanaan dan koordinasi penanggulangan kemiskinan • Peningkatan koordinasi dan sinergi program penanggulangan kemiskinan yang dilakukan kementerian, pemerintah daerah, dan swasta (corporate social responsibility)
	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kualitas sumber daya manusia 	<ul style="list-style-type: none"> • Papua • Papua Barat 	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan akses pelayanan pendidikan dan ketrampilan kerja 	<p>Prioritas Nasional</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan APM Pendidikan Dasar, Mengengah dan SMA • Pemantapan/ rasionalisasi implementasi BOS • Penurunan harga buku standar di tingkat sekolah dasar dan menengah • Penyediaan sambungan internet ber-content pendidikan ke sekolah tingkat menengah selambat-lambatnya 2012 dan terus diperluas ke tingkat sekolah dasar

ISU STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN	WILAYAH	STRATEGI PENGEMBANGAN	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS
				<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan APK Pendidikan Tinggi • Penyesuaian sistem Ujian Akhir Nasional pada 2011 • Penyempurnaan kurikulum sekolah dasar-menengah sebelum tahun 2011 yang diterapkan di 25% sekolah pada 2012 dan 100% pada 2014 • Pemberdayaan peran Kepala Sekolah sebagai manager sistem pendidikan yang unggul • Revitalisasi peran Pengawas Sekolah sebagai entitas quality assurance • Mendorong aktivasi peran Komite Sekolah untuk menjamin keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses pembelajaran • Mendorong aktivasi peran Dewan Pendidikan di tingkat kabupaten • Penataan ulang kurikulum sekolah yang dibagi menjadi kurikulum tingkat nasional, daerah, dan sekolah dengan memasukkan pendidikan kewirausahaan • Program remediasi kemampuan mengajar guru • Penerapan sistem evaluasi kinerja profesional tenaga pengajar • Sertifikasi ISO 9001:2008 • Peningkatan kerjasama PTN dengan lembaga pendidikan internasional • Mendorong 11 PT masuk Top 500 THES pada 2014 • Peningkatan perbandingan guru:murid • Memastikan tercapainya Standar Nasional Pendidikan (SNP) bagi Pendidikan Agama dan Keagamaan paling lambat tahun 2013 • Layanan Jasa Perpustakaan dan Informasi • Pengembangan Perpustakaan dan Pengkajian Minat Baca <p>Prioritas Pulau</p>

ISU STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN	WILAYAH	STRATEGI PENGEMBANGAN	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS
			<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan akses pelayanan kesehatan 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan pendidikan vokasional • Penyelenggaraan Pendidikan Keaksaraan Fungsional • Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan • Penyelenggaraan Kursus dan Magang <p>Prioritas Nasional</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak • Pemberian imunisasi dasar kepada balita • Penyediaan akses sumber air bersih • Peningkatan akses sanitasi dasar berkualitas • Pemberlakuan Daftar Obat Esensial Nasional (DOEN) sebagai dasar pengadaan obat di seluruh Indonesia dan pembatasan harga obat generik bermerek pada tahun 2010 • Perluasan Asuransi Kesehatan Nasional melalui : i) Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin di Puskesmas; ii) Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin di Rumah Sakit; iii) Dukungan Manajemen Pengelolaan, Pembinaan, dan Pengembangan Jaminan Kesehatan • Peningkatan kualitas dan jangkauan layanan KB melalui klinik pemerintah dan swasta melalui: i) Pembinaan kesertaan ber KB; ii) Penguatan Sumberdaya Penyelenggara program KB; iii) Peningkatan advokasi pada stakeholder; iv) Peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi pengendalian penduduk dan KB; v) Pengembangan Media Komunikasi; vi) Peningkatan kemitraan dengan lintas sektor dan pemda; viii) Peningkatan kemitraan dengan sektor swasta, LSM, dan masyarakat; viii) Penyediaan data dan informasi program kependudukan dan KB • Penurunan prevalensi Tuberculosis • Penurunan kasus malaria (Annual Parasite Index-API)

ISU STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN	WILAYAH	STRATEGI PENGEMBANGAN	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS
				<ul style="list-style-type: none"> • Pengendalian prevalensi HIV pada populasi dewasa • Penurunan prevalensi kekurangan gizi (terdiri dari gizi-kurang dan gizi-buruk) pada anak balita • Peningkatan kualitas gizi dan keanekaragaman pangan melalui pola pangan harapan Prioritas Pulau <ul style="list-style-type: none"> • Pemberian insentif bagi tenaga medis yang ditempatkan di perdesaan, daerah tertinggal, terpencil, dan perbatasan • Peningkatan edukasi masyarakat tentang pola hidup sehat • Peningkatan kualitas lingkungan permukiman
Tingginya prevalensi HIV/AIDS <ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya kasus AIDS/HIV di perkotaan dan perdesaan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengendalian HIV/AIDS 	<ul style="list-style-type: none"> • Papua • Papua Barat 	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan upaya pencegahan penularan HIV/AIDS 	Prioritas Nasional <ul style="list-style-type: none"> • Pengendalian prevalensi HIV pada populasi dewasa (persen) Prioritas Pulau <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan informasi dan edukasi masyarakat • Penyediaan dan pemerataan sarana dan prasarana kesehatan untuk pencegahan penularan HIV/AIDS • Penyediaan prasarana dan sarana kesehatan bagi penderita HIV/AIDS • Pemberdayaan kelompok ODHA
Tingginya potensi pelanggaran hak asasi manusia berbasis ikatan adat dan komunal <ul style="list-style-type: none"> • Tingginya kasus kekerasan dan hak asasi manusia dan resiko konflik pertanahan di Provinsi 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kesadaran dan penghormatan terhadap hak asasi manusia 	<ul style="list-style-type: none"> • Papua • Papua Barat 	<ul style="list-style-type: none"> • Memperkuat kelembagaan pemerintahan di tingkat lokal 	Prioritas Nasional <ul style="list-style-type: none"> • Pendidikan dan pelatihan Bidang Pemerintahan dan Politik • Penataan Produk Hukum dan Pelayanan Bantuan Hukum Departemen • Peningkatan integrasi dan integritas penerapan dan penegakan hukum oleh seluruh lembaga dan aparat hukum • Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan

ISU STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN	WILAYAH	STRATEGI PENGEMBANGAN	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS
Papua dan Papua Barat				<ul style="list-style-type: none"> • Penataan Produk Hukum dan Pelayanan Bantuan Hukum Departemen Prioritas Pulau <ul style="list-style-type: none"> • Penataan kelembagaan desa untuk penguatan aparat desa
			<ul style="list-style-type: none"> • Menghormati dan memperkuat lembaga adat 	Prioritas Pulau <ul style="list-style-type: none"> • Pemberdayaan lembaga adat dalam penyelesaian konflik • Peningkatan partisipasi lembaga adat dalam perencanaan dan pengambilan keputusan • Penghormatan terhadap hukum adat
			<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan kerjasama antara kepolisian dan pemuka adat dalam penanganan konflik 	Prioritas Pulau <ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan budaya harmonis • Pencegahan dan menanggulangi kejahatan dan tindak pelanggaran hukum • Pengembangan dan peningkatan jaringan komunikasi intelijen (prioritas nasional) • Peningkatan keamanan • Pemberdayaan community policing
Meningkatnya kebutuhan ketahanan pangan <ul style="list-style-type: none"> • Rendahnya luas panen dan produksi tanaman pangan di Provinsi Papua dan Papua Barat 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan ketahanan pangan di tingkat wilayah 	<ul style="list-style-type: none"> • Papua • Papua Barat 	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman pangan 	Prioritas Nasional <ul style="list-style-type: none"> • Penataan regulasi untuk menjamin kepastian hukum atas lahan pertanian • Pengembangan areal pertanian baru • Penertiban, serta optimalisasi penggunaan lahan terlantar • Pembangunan dan pemeliharaan sarana transportasi dan angkutan yang melayani daerah-daerah sentra produksi pertanian demi peningkatan kuantitas dan kualitas produksi serta kemampuan pemasarannya • Pembangunan dan pemeliharaan pengairan yang melayani daerah-daerah sentra produksi pertanian demi peningkatan kuantitas dan kualitas produksi

ISU STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN	WILAYAH	STRATEGI PENGEMBANGAN	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS
				<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan upaya penelitian dan pengembangan bidang pertanian yang mampu menciptakan benih unggul dan hasil penelitian lainnya menuju kualitas dan produktivitas hasil pertanian nasional yang tinggi • Dorongan untuk investasi pangan, pertanian, dan industri perdesaan berbasis produk lokal oleh pelaku usaha dan pemerintah • Penyediaan pembiayaan yang terjangkau • Sistem subsidi yang menjamin ketersediaan benih varietas unggul yang teruji, pupuk, teknologi dan sarana pasca panen yang sesuai secara tepat waktu, tepat jumlah, dan terjangkau • Pengambilan langkah-langkah konkrit terkait adaptasi danantisipasi sistem pangan dan pertanian terhadap perubahan iklim • Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya • Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku • Peningkatan Deregulasi Kebijakan • Pengembangan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) • Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Penanaman Modal • Administrasi Badan Hukum • Revitalisasi Pasar Tradisional • Pengembangan dan penetapan sistem logistik nasional yang menjamin kelancaran arus barang dan mengurangi biaya transaksi/ekonomi biaya tinggi • Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Jalan Nasional • Koordinasi pengembangan urusan penataan ruang dan pengembangan wilayah

ISU STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN	WILAYAH	STRATEGI PENGEMBANGAN	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS
			<ul style="list-style-type: none"> • Memperkuat interaksi perdagangan antarwilayah 	<p>Prioritas Pulau</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penerapan teknologi tepat guna • Pengendalian konversi lahan pertanian terutama yang beririgasi teknis • Perbaikan distribusi input produksi pertanian (bibit unggul, pupuk, pestisida, alat-alat pertanian) <p>Prioritas Nasional</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan dan pemeliharaan teknologi komunikasi dan sistem informasi nasional yang melayani daerah-daerah sentra produksi pertanian demi peningkatan kuantitas dan kualitas produksi serta kemampuan pemasarannya • Pembangunan jaringan prasarana dan penyediaan sarana transportasi antar moda dan antar pulau yang terintegrasi sesuai dengan sistem transportasi nasional dan cetak biru transportasi multimoda • Penuntasan pembangunan jaringan serat optik di Indonesia Bagian Timur sebelum 2013 • Penyediaan Jasa Telekomunikasi • Peningkatan Deregulasi Kebijakan Peningkatan Kelancaran Distribusi Bahan Pokok • Revitalisasi Pasar Tradisional • Koordinasi Penataan dan Pengembangan Sistem Logistik Nasional • Perumusan Kebijakan dan Bimbingan Teknis Fasilitas Bidang Kepabeanaan (Prioritas Nasional) • Pengembangan dan penetapan sistem logistik nasional yang menjamin kelancaran arus barang dan mengurangi biaya transaksi/ekonomi biaya tinggi • Pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan di bidang lalu lintas dan angkutan laut (Pembangunan kapal perintis dan subsidi operasi perintis)

ISU STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN	WILAYAH	STRATEGI PENGEMBANGAN	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS
			<ul style="list-style-type: none"> • Diversifikasi pangan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengelolaan dan pembangunan kegiatan di bidang pelabuhan dan pengerukan • Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Jalan Nasional • Perumusan Kebijakan dan Pengembangan Teknologi Informasi Kepabeaan dan Cukai • Pengembangan sertifikasi sistem elektronik jasa aplikasi dan konten untuk mendukung transaksi elektronik • Koordinasi pengembangan dan penerapan sistem National Single Window/NSW dan ASEAN Single Window/ASW <p>Prioritas Nasional</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan dan pemeliharaan pengairan yang melayani daerah-daerah sentra produksi pertanian demi peningkatan kuantitas dan kualitas produksi • Dorongan untuk investasi pangan, pertanian, dan industri perdesaan berbasis produk lokal oleh pelaku usaha dan pemerintah • Peningkatan kualitas gizi dan keanekaragaman pangan melalui pola pangan harapan • Pengambilan langkah-langkah konkrit terkait adaptasi dan antisipasi sistem pangan dan pertanian terhadap perubahan iklim <p>Prioritas Pulau</p> <ul style="list-style-type: none"> • Revitalisasi bahan pangan • Pengembangan penelitian inovatif bahan pangan alternatif
<p>Keragaman hayati wilayah Papua dan Mitigasi Bencana</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tingginya keragaman hayati di Provinsi Papua dan Papua Barat 	<ul style="list-style-type: none"> • Pelestarian dan pemanfaatan keragaman hayati di wilayah Papua 	<ul style="list-style-type: none"> • Papua • Papua Barat 	<ul style="list-style-type: none"> • Mengarusutnamakan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dalam kebijakan publik 	<p>Prioritas Nasional</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengambilan langkah-langkah konkrit terkait adaptasi dan antisipasi sistem pangan dan pertanian terhadap perubahan iklim • Koordinasi pengembangan urusan penataan ruang dan pengembangan wilayah

ISU STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN	WILAYAH	STRATEGI PENGEMBANGAN	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS
<ul style="list-style-type: none"> Potensi bencana alam 				<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan keberdayaan pengelolaan lahan gambut Penurunan beban pencemaran lingkungan melalui pengawasan ketaatan pengendalian pencemaran air limbah dan emisi <p>Prioritas Pulau</p> <ul style="list-style-type: none"> Penetapan kawasan lindung dan konservasi dalam dokumen rencana tata ruang Penyusunan peraturan perundangan tentang kawasan hutan konservasi Penegakan peraturan dalam pemanfaatan ruang Pengembangan kerjasama penelitian dalam keanekaragaman hayati Pemanfaatan keanekaragaman hayati sebagai potensi wisata alam
	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan kewaspadaan dini terhadap potensi bencana alam 	<ul style="list-style-type: none"> Papua Papua Barat 	<ul style="list-style-type: none"> Mengembangkan sistem mitigasi bencana 	<p>Prioritas Nasional</p> <ul style="list-style-type: none"> Penjaminan berjalannya fungsi Sistem Peringatan Dini Tsunami (TEWS), mulai 2010 dan seterusnya Penjaminan berjalannya fungsi Sistem Peringatan Dini Cuaca (MEWS) mulai 2010 dan seterusnya Penjaminan berjalannya fungsi Sistem Peringatan Dini Iklim (CEWS) pada 2013 Peningkatan kapasitas aparat pemerintah dan masyarakat dalam usaha pengurangan risiko, mitigasi dan penanganan bencana dan bahaya kebakaran hutan Penyiapan peralatan dan logistik di kawasan rawan bencana